SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;

b. bahwa rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai landasan penyusunan rencana kegiatan anggaran dan daftar pelaksanaan anggaran;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
7. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyusunan Renja-PD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai:
   a. gambaran tentang Program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran;
   b. pedoman setiap Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD Tahun 2025; dan
   c. pedoman Perangkat Daerah dalam peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian Program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Renja-PD Tahun 2025 bertujuan untuk menciptakan sinkronisasi dan integrasi Program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan antara rencana strategis dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu yang menjadi rencana strategis Perangkat Daerah.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III

RENJA-PD

Pasal 3

(1) Renja masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2025, disusun dengan sistematika yang terdiri atas:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Hasil Evaluasi Renja-PD Tahun Lalu;

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah:

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

BAB V : Penutup.

(2) Rincian Renja-PD Tahun 2025 terdiri atas:

a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
e. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
f. Badan Pendapatan Daerah;
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
h. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
i. Dinas Kesehatan;
j. Dinas Sosial;
k. Dinas Pekerjaan Umum;
l. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
m. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
n. Dinas Perhubungan;
o. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
q. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
r. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
s. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
t. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

u. Dinas Komunikasi dan Informatika;
v. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
w. Dinas Ketahanan Pangan;
x. Dinas Pertanian dan Peternakan;
y. Dinas Perkebunan;
z. Dinas Kelautan dan Perikanan;
aa. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
bb. Dinas Pariwisata;
cc. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
dd. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
ee. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
ff. Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan;
gg. Sekretariat Daerah;
hh. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
ii. Inspektorat;
jj. Satuan Polisi Pamong Praja;
kk. RSUD AM. Parikesit;
ll. RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti;
mm. RSUD Dayaku Raja;
nn. Kecamatan Tenggarong;
oo. Kecamatan Tenggarong Seberang;
pp. Kecamatan Loa Kulu;
qq. Kecamatan Loa Janan;
rr. Kecamatan Muara Kaman;
ss. Kecamatan Sebulu;
tt. Kecamatan Muara Badak;
uu. Kecamatan Marang Kayu;
vv. Kecamatan Muara Jawa;
ww. Kecamatan Samboja;
xx. Kecamatan Anggana;
yy. Kecamatan Sanga-Sanga;
zz. Kecamatan Kota Bangun;
aaa. Kecamatan Muara Wis;
bbb. Kecamatan Muara Muntai;
ccc. Kecamatan Kenohan;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

ddd. Kecamatan Kembang Janggut; dan

eee. Kecamatan Tabang;

fff. Kecamatan Kota Bangun Darat; dan

ggg. Kecamatan Samboja Barat.

(3) Ketentuan mengenai rincian Renja-PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PERUBAHAN RENJA-PD

Pasal 4

(1) Perubahan Renja-PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

(2) Perkembangan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuanganDaerah, rencana Program dan kegiatan RKPD berkenaan;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada perubahan RKPD.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 5

Renja-PD Tahun 2025 dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Agustus 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

a.RENJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang.

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan daerah, meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional.
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah yang

memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program OPD, lintas OPD, program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

Dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan menjabarkan rencana detail teknis pelaksanaan Organisasi Perangkat Daaerah (OPD) menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja-OPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangungan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 dan sebagai upaya untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Renja-OPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mempunyai kedudukan dan fungsi strategis dalam sistem perencanaan daerah karena Renja-OPD merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka anggaran guna menjamin penyelenggaraan

pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja-OPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra OPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Renja-OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja-OPD menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah–langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-OPD.

1. 2. Landasan Hukum

Bahwa penyusunan Renja-OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud disusunnya Renja-OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain :

a. membantu meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya;
b. meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program ;
c. menyelaraskan program dengan penganggaran;
d. meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;dan
e. terwujudnya penilaian kinerja yang terukur sesuai dengan Renstra OPD.

Sedangkan, tujuannya adalah:

a. menjabarkan rencana strategis kedalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
b. menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;dan
c. sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Bab V : Penutup.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra PD merupakan kegiatan yang bersifat regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasikan pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra PD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daaerah (DPA-OPD) tahun berjalan.

Untuk capaian Program, Kegiatan dan Sub Program sampai dengan Triwulan II sampai dengan saat ini telah mecapai rata-rata 60% progres pelaksanaan dan 44,50 % capaian Realisasi Keuangan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis Acrual. Penganggaran berbasis Acrual merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun program kegiatan. BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara selain mempunyai tugas dan fungsi koordinator juga melakukan fungsi pengelola keuangan dan aset daerah sebagai bagian dari OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam

Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa SKPKD selaku PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Memperhatikan ketentuan tersebut, nampak bahwa BPKAD sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan secara tidak langsung juga mendukung capaian kinerja 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan representasi dari Misi ke 1 (satu) "*Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, fesien dan Melayani.*" sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 yaitu:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan, Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat Akuntabilitas BPKAD	Nilai yang dikeluarkan oleh Tim Penilai	BPKAD
2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	Penyajian Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan	Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	BPKAD
		Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	BPKAD
		Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Kesesuaian Pengelolaan BMD, sesuai Peraturan Perundang-undangan	BPKAD

Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja program kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada Tabel T-C. 29

Tabel T-C.29

Rekaptiluasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra

Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Kutai Kartanegara.

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	80	Nilai	70,99	Nilai	73	Nilai	69,50	Nilai	100	75	Nilai	69,50	Persen	100	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		Daerah terhadap Target Hasil Program RPJMD															
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100	3	Dokumen	9	Dokumen	60	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen		Dokumen	60	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen		Dokumen	60	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen		Dokumen	60	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen		Dokumen	60	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	10	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	2	Laporan		Laporan	60	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan		Laporan	60	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840	orang/ Bulan	168	orang/ Bulan	168	orang / Bulan	168	orang / Bulan	100	168	orang/ Bulan	504	orang/ Bulan	60	
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	100	10	Dokumen	30	Dokumen	60	
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	2750	Dokumen	550	Dokumen	550	Dokumen	550	Dokumen	100	550	Dokumen	1650	Dokumen	60	
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	60	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		Akuntansi SKPD															
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	3	Laporan	60	
13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	60	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD K	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	36	Laporan	60	
15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	60	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		Anggaran															
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100	
16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	60	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
17	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	20	Unit	4	Unit	4	Unit	4	Unit	100	4	Unit	12	Unit	60	
18	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	600	Paket	200	Paket	200	Paket	200	Paket	100	200	Paket	600	Paket	100	
19	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	60	
20	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi	45	Dokumen	9	Dokumen	9	Dokumen	9	Dokumen	100	9	Dokumen	27	Dokumen	60	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		Kepegawaian															
21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang	20	Orang	20	Orang	20	Orang	100	20	Orang	60	Orang	60	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100	
22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	245	unit	49	unit	49	unit	49	unit	100	49	unit	147	unit	60	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	Kantor	Kantor yang Disediakan															
23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	3	Paket	60	
24	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	3	Paket	60	
25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750	:Laporan	150	Laporan	150	:Laporan	150	:Laporan	100	150	:Laporan	450	:Laporan	60	
26	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	60	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		pada SKPD															
27	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	60	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100	
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	36	Laporan	60	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.															
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	36	Laporan	60	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100	
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	30	Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	100	6	Unit	18	Unit	60	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya															
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	Unit	20	Unit	20	Unit	20	Unit	100	20	Unit	60	Unit	60	
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300	Unit	60	Unit	60	Unit	60	Unit	100	60	Unit	180	Unit	60	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	Unit	3	Unit	3	Unit	3	Unit	100	3	Unit	9	Unit	60	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Kualitas Perencanaan dan Penganggaran APBD	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100	
		Tingkat Transparansi pengelolaan keuangan daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100	
		Tingkat Kualitas Penatausahaan APBD	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100	
		Pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan APBD sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik.	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100	
		Persentase konsistensi perencanaan dengan penganggaran	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		Persentase aparatur perencanaan anggaran Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan perencanaan anggaran	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100	
34	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	60	
35	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	60	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
36	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	290	Dokumen	58	Dokumen	58	Dokumen	58	Dokumen	100	58	Dokumen	174	Dokumen	60	
37	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	290	Dokumen	58	Dokumen	58	Dokumen	58	Dokumen	100	58	Dokumen	174	Dokumen	60	
38	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	60	
39	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	60	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
40	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	6	Dokumen	60	
41	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	6	Dokumen	60	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
42	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	60	
43	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	60	
44	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	60	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
45	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	60	
46	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	580	Orang	116	Orang	116	Orang	116	Orang	100	116	Orang	348	Orang	60	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		Persentase Transaksi Non Tunai	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100	
		Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100	
		Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100	
47	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	60	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		Pengelolaan Kas Daerah															
48	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Laporan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	3	Laporan	60	
49	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan	60	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100	12	Dokumen	36	Dokumen	60	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		dan Dana Transfer Lainnya															
50	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	60	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
51	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	50000	Dokumen	10000	Dokumen	10000	Dokumen	10000	Dokumen	100	10000	Dokumen	30000	Dokumen	60	
52	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1160	Orang	232	Orang	232	Orang	232	Orang	100	232	Orang	696	Orang	60	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan disajikan tepat waktu	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100	
		Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100	
		Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		laporan sesuai SAP															
53	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	3	Laporan		
54	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	6	Dokumen	60	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	dan Beban	Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban															
55	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	15	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100	3	Laporan	9	Laporan	60	
56	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah	15	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100	3	Laporan	9	Laporan	60	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	Pemerintah Daerah	Daerah yang Terkonsolidasi															
57	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	6	Dokumen	60	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota															
58	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	580	Orang	116	Orang	116	Orang	116	Orang	100	116	Orang	348	Orang	60	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa															
59	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	30	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	100	6	Laporan	18	Laporan	60	
60	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	50	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	100	10	Laporan	30	Laporan	60	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang mampu mengelola Aset dengan Baik	0,85	Persen	0,85	Persen	0,85	Persen	0,85	Persen	100	0,85	Persen	0,85	Persen	100	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100	
		Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100	
		Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100	
61	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	6	Dokumen	60	
62	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	60	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	Barang Milik Daerah	(LHI) Barang Milik Daerah															
63	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	60	
64	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	3	Laporan	60	
65	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	3	Laporan	60	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
66	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	6	Dokumen	60	
67	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	3	Laporan	60	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)			Catatan
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
68	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	3	Laporan	60	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT.

2.2.1. *Strength* (kekuatan),

1. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator pengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara serta Raperbup tentang Pejabaran APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai dengan ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan yang cukup.
4. Memiliki sarana, prasarana dan sistem informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD.

2.2.2. *Weaknes* (kelemahan),

1. Diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi ;
2. Adanya lembaga/instansi yang masih memiliki keinginan (ego sektoral) untuk menjadi arus utama dalam suatu program dan kegiatan tanpa memperhatikan sektor-sektor yang ada ;
3. Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki kepedulian, memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap

tugas pokok dan fungsi BPKAD serta masih kurangnya disiplin kerja ;

4. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/ informal yang disebabkan kompleksitas pengelola keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi ;
5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta terbatasnya kesempatan pegawai untuk meningkatkan keahlian, kemampuan dan wawasan, utamanya di bidang pengelola keuangan dan aset daerah.

2.2.3. *Opportunity* (peluang),

1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan APBD/rancangan Perubahan APBD, mengesahkan DPA-OPD, menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah. Untuk itu, BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka fasilitasi OPD melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelola keuangan daerah ;
2. Sesuai Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah dan Pasal 305 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa untuk menunjang kelancaran, konsistensi dan sinkronisasi penyusunan APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang lebih tinggi, masing-masing Raperda Kabupaten Kutai Kartanegara disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk dievaluasi ;

3. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pengelola keuangan daerah, maka BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.2.4. *Treath* (ancaman),

1. Banyaknya PNS yang memasuki Masa Purna Pensiun (MPP). Oleh karena itu, untuk kedepan diperlukan adanya tambahan PNS baru yang memiliki dedikasi, loyalitas, kualitas dan kompetensi yang tinggi sesuai latar belakang pendidikannya dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi BPKAD ;
2. Semangat yang berlebihan (euphoria) terhadap pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, yang seringkali menimbulkan pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku antara Eksekutif dan Legislatif, namun kurang memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika yang berkembang ;
3. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual.

Tabel T-C. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra -PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase Tahapan Penyusunan APBD Tepat Waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Penyusunan APBD Sesuai Prinsip Penganggaran Yang Baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Aparatur Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah Mendapatkan Pembinaan Perencanaan Anggaran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Laporan Keuangan Disajikan Tepat Waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Tingkat Pemenuhan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra -PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
	Peraturan dan Pedoman Pengelolaan Akuntansi												
7	Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase Transaksi Non Tunai			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra -PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
13	Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD .

Isu–isu atau permasalahan–permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta faktor–faktor yang mempengaruhinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang, situasi dan kondisi baik dari lingkungan internal maupun eksternalnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dalam pengelola keuangan.
3. Belum optimalnya pemahaman aparatur dalam memahami peraturan perundangan yang berlaku.
4. Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi dalam pengelola keuangan di masing-masing OPD.

Permasalahan tersebut terjadi karena faktor–faktor yang mempengaruhi anatara lain :

1. Masih terbatasnya SDM yang berlatar belakang pendididkan tentang pengelola keuangan.
2. Sering terjadinya perubahan peraturan pengelola keuangan daerah.
3. Masih terbatasnya SDM dalam penguasaan perkembangan teknologi informasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, misalnya rumusan program dan kegiatan baru yang terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sudah sesuai namun besarannya berbeda. Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel T-C. 31, sebagai berikut :

Tabel T-C. 31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025.

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
5.02	KEUANGAN						KEUANGAN					-	
02.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					542.697.333.038	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					901.085.114.020	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKAD Kab. Kukar	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	75	Nilai	38.451.964.497	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKAD Kab. Kukar	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	75	Nilai	74.527.682.215	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terhadap Target Hasil Program RPJMD	100	%	484.135.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terhadap Target Hasil Program	100	%	964.680.000	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
									RPJMD				
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	116.860.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan	3	Dokumen	450.000.000	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	61.560.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen RKA	1	Dokumen	61.560.000	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	45.780.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1	Dokumen	45.780.000	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	61.560.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen DPA	1	Dokumen	61.560.000	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	45.780.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1	Dokumen	45.780.000	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Dokumen	69.560.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Pelaporan	2	Dokumen	50.000.000	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	3	Dokumen	83.035.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Evaluasi	3	Dokumen	150.000.000	
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	-	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik	1	Dokumen	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
									Sektoral Daerah				
5.02.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Berita Acara	-	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Berita Acara	50.000.000	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Presentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	%	22.044.084.353	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Presentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan	100	%	57.549.257.071	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
									ketentuan yang berlaku				
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	20.899.422.353	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD Kab. Kukar	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	56.527.121.071	
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10	Laporan	151.860.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10	Laporan	151.860.000	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	600	Dokumen Verifikasi	67.930.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600	Dokumen Verifikasi	67.930.000	
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BPKAD Kab. Kuka	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	62.062.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BPKAD Kab. Kuka	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	1	Dokumen	62.062.000	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
		r						r	SKPD				
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	91.560.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	25.000.000	
5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Laporan	42.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Bahan Tanggapan	1	Laporan	42.000.000	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD K	12	bulan	648.284.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan SKPD	12	bulan	648.284.000	
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	BPKAD Kab.	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	1	Dokumen	80.966.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BPKAD Kab.	Jumlah Pelaporan Keuangan dan	12	bulan	25.000.000	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
	Realisasi Anggaran	Kukar	Anggaran					Kukar	Pajak Bulanan				
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	100.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	190.000.000	
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	100.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	100.000.000	
5.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Kepmen	1	Laporan		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	30.000.000	
5.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	10.000.000	
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase Pendapatan kewenangan Perangkat Daerah	100	%	-	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase Pendapatan kewenangan Perangkat Daerah	100	%	10.000.000	
5.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	-	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	10.000.000	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	345.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	345.000.000	
5.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4	Dokumen	40.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4	Dokumen	40.000.000	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	200	stel	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Pakaian Dinas	200	stel	-	
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	80.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	80.000.000	
5.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	BPKAD Kab.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem	1	Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BPKAD Kab.	Jumlah Dokumen Informasi	1	Dokumen	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
	Kepegawaian	Kukar	Informasi Kepegawaian					Kukar	Kepegawaian				
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25	0rang	175.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi	25	0rang	175.000.000	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	100	%	2.117.918.220	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	100	%	2.117.918.220	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65	unit	476.474.720	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65	unit	476.474.720	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2083	Porsi	124.989.680	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2083	Porsi	124.989.680	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan	BPKAD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1	Paket	184.580.000	Penyediaan Barang Cetakan dan	BPKAD	Jumlah Penyediaan	1	Paket	184.580.000	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
	Penggandaan	Kab. Kukar	Penggandaan yang Disediakan			0	Penggandaan	Kab. Kukar	Barang Cetakan dan Penggandaan				
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Kali	781.296.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100	Kali	781.296.000	
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	251.857.820	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	1	Dokumen	251.857.820	
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Website	298.720.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Website	1	Website	298.720.000	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100	%	12.399.394.124	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100	%	12.399.394.124	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	12	bulan	1.039.640.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah bulan terbayarnya telpon, air dan listrik	12	bulan	1.039.640.000	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	bulan	11.359.754.124	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah tenaga PTT yang melaksanakan tugas administrasi/teknis perkantoran	12	bulan	11.359.754.124	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100	%	961.432.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100	%	961.432.800	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	bulan	151.851.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah kendaraan Perorangan dinas/Dinas Jabatan yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	12	bulan	151.851.400	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	bulan	101.548.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	12	bulan	101.548.400	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	unit	101.860.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Peralatan yang mendapat pemeliharaan	60	unit	101.860.000	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Bulan	606.173.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	12	Bulan	606.173.000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD Kab. Kukar	Tingkat Kualitas Perencanaan dan Penganggaran APBD	100	%	502.115.830.951	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD Kab. Kukar	Tingkat Kualitas Perencanaan dan Penganggaran APBD	100	%	824.417.894.215	
			Tingkat Transparansi pengelolaan keuangan daerah	100	%				Tingkat Transparansi pengelolaan	100	%		

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
									keuangan daerah				
			Tingkat Kualitas Penatausahaan APBD	100	%				Tingkat Kualitas Penatausahaan APBD	100	%		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu	100	%	4.020.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu	100	%	4.020.000.000	
			Pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan APBD sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik	100	%				Pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan APBD sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik	100	%		
			Persentase konsistensi perencanaan dengan penganggaran	100	%				Persentase konsistensi perencanaan dengan penganggaran	100	%		

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
			Persentase aparatur perencanaan anggaran Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan perencanaan anggaran	100	%				Persentase aparatur perencanaan anggaran Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan perencanaan anggaran	100	%		
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD Kab. Kukar	Dokumen KUA PPAS	1	Dokumen	200.000.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD Kab. Kukar	Dokumen KUA PPAS	1	Dokumen	200.000.000	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD Kab. Kukar	Dokumen KUA PPAS Perubahan	1	Dokumen	200.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD Kab. Kukar	Dokumen KUA PPAS Perubahan	1	Dokumen	200.000.000	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	58	OPD	250.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	58	OPD	250.000.000	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	58	OPD	250.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	58	OPD	250.000.000	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	58	OPD	135.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	58	OPD	-	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	58	OPD	135.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	58	OPD	-	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD Kab. Kukar	Rancangan Peraturan tentang penjabaran APBD	1	Raperda	800.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD Kab. Kukar	Rancangan Peraturan tentang penjabaran APBD	1	Raperda	800.000.000	
			Rancangan perda tentang APBD	1	Raperda				Rancangan perda tentang	1	Raperda		

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
									APBD				
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD Kab. Kukar	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1	Raperda	800.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD Kab. Kukar	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1	Raperda	800.000.000	
			Rancangan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD	1	Raperbup		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD Kab. Kukar		1	Raperbup		
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD Kab. Kukar	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	1	Raperbup	300.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD Kab. Kukar	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	1	Raperbup	300.000.000	
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKAD Kab.	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1	Laporan	200.000.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKAD Kab.	Jumlah Koordinasi Perencanaan	1	Laporan	200.000.000	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
		Kukar						Kukar	Anggaran Pendapatan				
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1	Laporan	500.000.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1	Laporan	500.000.000	
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1	Laporan	250.000.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1	Laporan	250.000.000	
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	116	Orang	-	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	116	Orang	270.000.000	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah	100	%	1.080.911.910	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaa	100	%	1.080.911.910	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
									n daerah				
			Persentase Transaksi Non Tunai	100	%				Persentase Transaksi Non Tunai	100	%		
			Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu	100	%				Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu	100	%		
			Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan	100	%				Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan	100	%		
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1	Laporan	79.545.455	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah laporan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1	Laporan	79.545.455	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1	Laporan	60.000.000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1	Laporan	60.000.000	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD Kab. Kukar	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer	12	Dokumen	213.075.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD Kab. Kukar	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer	12	Dokumen	213.075.000	
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama	1	Dokumen	85.700.000	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama	1	Dokumen	85.700.000	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD Kab. Kukar	Dokumen SP2D	10000	Dokumen	49.982.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD Kab. Kukar	Dokumen SP2D	10000	Dokumen	49.982.000	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan	58	OPD	592.609.455	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan	58	OPD	592.609.455	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase Laporan Keuangan disajikan tepat waktu	100	%	1.308.733.126	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase Laporan Keuangan disajikan tepat waktu	100	%	1.308.733.126	
			Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi	100	%				Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi	100	%		

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
			Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP	100	%				Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP	100	%		
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12	Laporan	162.712.000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12	Laporan	162.712.000	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	BPKAD Kab. Kukar	Laporan Keuangan Semesteran	2	Dokumen	50.000.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	BPKAD Kab. Kukar	Laporan Keuangan Semesteran	2	Dokumen	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
	Pendapatan-LO dan Beban						Pendapatan-LO dan Beban						
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2	Dokumen	60.000.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2	Dokumen	60.000.000	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Dokumen Rekonsiliasi Belanja	4	Dokumen	599.999.800	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Dokumen Rekonsiliasi Belanja	4	Dokumen	599.999.800	
			Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD	4	Dokumen					4			
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan	BPKAD Kab. Kukar	Rancangan peraturan tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	Raperda	199.999.800	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan	BPKAD Kab. Kukar	Rancangan peraturan tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	Raperda	199.999.800	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
	Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						
			Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	Raperda				Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	Raperda		
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi	58	OPD	236.021.526	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi	58	OPD	236.021.526	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa	100	%	495.706.185.915	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan	100	%	818.008.249.179	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
									Keuangan Desa				
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100	%	10.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Penyediaan Belanja Tak Terduga	100	%	50.000.000.000	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1	%	485.706.185.915	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan	1	%	768.008.249.179	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKAD Kab. Kukar	Tingkat Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	90	%	2.129.537.590	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKAD Kab. Kukar	Tingkat Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	90	%	2.129.537.590	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016	100	%	2.129.537.590	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri	100	%	2.129.537.590	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
									19/2016				
			Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	100	%				Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	100	%		
			Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD	100	%				Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD	100	%		
			Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD	100	%				Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan	100	%		

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
									BMD				
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	Dokumen	345.866.000	Penyusunan Standar Harga	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Standar Harga	1	Dokumen	345.866.000	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	Dokumen	100.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD	1	Dokumen	100.000.000	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	230.800.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Inventarisasi BMD	1	Dokumen	230.800.000	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	Dokumen	163.746.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah BMD yang diamankan	1	Dokumen	163.746.000	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	414.187.240	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah BMD yang dinilai	1	Dokumen	414.187.240	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	749.938.350	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah BMD yang dioptimalkan	1	Dokumen	749.938.350	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	Dokumen	75.000.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD	1	Dokumen	75.000.000	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	Dokumen	50.000.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Laporan BMD	1	Dokumen	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
	JUMLAH TOTAL					542.697.333.038	JUMLAH TOTAL					901.095.114.020	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2024 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan kebijakan yang membawa optimisme dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI, dengan 4 pilar utama, yaitu penguatan local taxing power, ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun, peningkatan kualitas belanja di daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara: ❑ Tertib; ❑ Efisien; ❑ Ekonomis; ❑ Efektif; ❑ Transparan; dan ❑ Bertanggung Jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik sehingga seluruh aktor pengelola keuangan daerah dapat memaksimalkan

perannya untuk dapat menjawab seluruh tantangan dan permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang ada

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain :

Tujuan	:	➢ Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan. ➢ Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Sasaran	:	➢ Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPKAD ➢ Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Sasaran	:	➢ Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPKAD. ➢ Ketepatan waktu Penetapan APBD dan APBD Perubahan. ➢ Meningkatnya PD dalam menyampaikan LK tepat Waktu. ➢ Presentase Ketepan Waktu Penerbitan SP2D. ➢ Meningkatnya PD dalam pengelolaan Aset dengan Baik.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk intrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan olek Perangkat Daerah, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program kerja BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Perangkat Daerah dalam hal ini BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas antara lain; menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerahtentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban PElaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun programnya bersifat regular, mengkoordinir dan memfasilitasi OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, utamanya di bidang pengelola keuangan dan aset daerah, meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Tahun 2025 yang menjadi pelaksanaan sub kegiatan prioritas adalah terkait pengamanan aset Pemerintah Daerah, Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh OPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD telah disusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun, rencana pelaksanaan program dan

kegiatan Tahun Anggaran 2025, terdapat 3 Program Kegiatan, 12 Kegiatan dan 68 Sub Kegiatan dengan nilai total pagu aggaran sebesar Rp.901.075.114.020,- (Sembilan Ratus Satu Milyar Tujuh Pukuh Lima Juta Seratus Empat Belas Ribu Dua Puluh Rupiah), sebagaimana tercantum dalam tabel T-C. 33, sebagai berikut :

Tabel T-C. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
	KEUANGAN										
02,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH										
5,02,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	77	Kali	74.527.682.215	APBD		80	Nilai	38.651.964.497
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terhadap Target Hasil Program RPJMD	BPKAD Kab. Kukar	100	%	964.680.000	APBD		100	%	484.135.000
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	3	Dokumen	450.000.000	APBD		3	Dokumen	116.860.000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	61.560.000	APBD		1	Dokumen	61.560.000
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	45.780.000	APBD		1	Dokumen	45.780.000
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	61.560.000	APBD		1	Dokumen	61.560.000
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	45.780.000	APBD		1	Dokumen	45.780.000
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD Kab. Kukar	2	Dokumen	50.000.000	APBD		2	Dokumen	69.560.000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	BPKAD Kab. Kukar	3	Dokumen	150.000.000	APBD		3	Dokumen	83.035.000
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	50.000.000	APBD		1	Dokumen	-
5.02.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1	BA	50.000.000	APBD		1	BA	-

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPKAD Kab. Kukar	100	%	57.549.257.071	APBD		100	%	22.044.084.353
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD Kab. Kukar	168	orang / Bulan	56.527.121.071	APBD		12	bulan	20.899.422.353
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKAD Kab. Kukar	10	Dokumen	151.860.000	APBD		10	Laporan	151.860.000
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	BPKAD Kab. Kukar	550	Dokumen	67.930.000	APBD		600	Dokumen Verifikasi	67.930.000
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	62.062.000	APBD		1	Dokumen	62.062.000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
		Akuntansi SKPD									
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BPKAD Kab. Kukar	1	Laporan	25.000.000	APBD		1	Dokumen	91.560.000
5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	42.000.000	APBD		1	Laporan	42.000.000
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD K	BPKAD Kab. Kukar	12	Laporan	648.284.000	APBD		12	bulan	648.284.000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	25.000.000	APBD		12	bulan	80.966.000
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	100	%	190.000.000	APBD		100	%	100.000.000
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	100.000.000	APBD		1	Dokumen	100.000.000
5.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Kepmen	BPKAD Kab. Kukar	1	Laporan	50.000.000	APBD		1	Laporan	-
5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	BPKAD Kab. Kukar	1	Laporan	30.000.000	APBD		1	Laporan	-

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
		Milik Daerah pada SKPD									
5.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	10.000.000	APBD		1	Dokumen	-
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan kewenangan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	100	%	20.000.000	APBD		100	%	-
5.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	10.000.000	APBD		1	Dokumen	-
X.XX.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah.	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	10.000.000	APBD		1	Dokumen	-
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	100	%	345.000.000	APBD		100	%	545.000.000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
5.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	BPKAD Kab. Kukar	4	Dokumen	40.000.000	APBD		4	Dokumen	40.000.000
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BPKAD Kab. Kukar	200	stel	-	APBD		200	stel	200.000.000
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	80.000.000	APBD		1	Dokumen	80.000.000
5.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	BPKAD Kab. Kukar	9	Laporan	50.000.000	APBD		6	Laporan	50.000.000
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	BPKAD Kab. Kukar	25	0rang	175.000.000	APBD		25	0rang	175.000.000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
		Perundang-Undangan									
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	BPKAD Kab. Kukar	100	%	2.117.918.220	APBD		100	%	2.117.918.220
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BPKAD Kab. Kukar	65	unit	476.474.720	APBD		65	unit	476.474.720
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BPKAD Kab. Kukar	2000	Porsi	124.989.680	APBD		2083	Porsi	124.989.680
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	BPKAD Kab. Kukar	1	Paket	184.580.000	APBD		1	Paket	184.580.000
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD Kab. Kukar	100	Kali	781.296.000	APBD		100	Kali	781.296.000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	251.857.820	APBD		1	Dokumen	251.857.820
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKAD Kab. Kukar	1	Website	298.720.000	APBD		1	Website	298.720.000
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	BPKAD Kab. Kukar	100	%	12.399.394.124	APBD		100	%	12.399.394.124
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	BPKAD Kab. Kukar	12	Laporan	1.039.640.000	APBD		12	bulan	1.039.640.000
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	BPKAD Kab. Kukar	12	Laporan	11.359.754.124	APBD		12	bulan	11.359.754.124

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
		Kantor yang Disediakan									
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	BPKAD Kab. Kukar	100	%	961.432.800	APBD		100	%	961.432.800
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BPKAD Kab. Kukar	6	Unit	151.851.400	APBD		12	bulan	151.851.400
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BPKAD Kab. Kukar	20	Unit	101.548.400	APBD		12	bulan	101.548.400
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BPKAD Kab. Kukar	60	Unit	101.860.000	APBD		60	unit	101.860.000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPKAD Kab. Kukar	3	Unit	606.173.000	APBD		12	Bulan	606.173.000
5,02,02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (lihat lagi program ini di ERPJMD)	Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Kukar	BPKAD Kab. Kukar	100	%	824.417.894.215	APBD		100	%	492.628.055.350
		Tingkat Transparansi pengelolaan keuangan daerah		100	%				100	%	
		Tingkat Kualitas Penatausahaan APBD		100	%				100	%	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu	BPKAD Kab. Kukar	100	%	4.020.000.000	APBD		100	%	4.020.000.000
		Pemenuhan peraturan dan pedoman		100	%				100	%	

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
		penyusunan APBD sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik									
		Persentase konsistensi perencanaan dengan penganggaran		100	%				100	%	
		Persentase aparatur perencanaan anggaran Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan perencanaan anggaran		100	%				100	%	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	200.000.000	APBD		1	Dokumen	200.000.000
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	200.000.000	APBD		1	Dokumen	200.000.000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	BPKAD Kab. Kukar	58	Dokumen	250.000.000	APBD		58	OPD	250.000.000
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	BPKAD Kab. Kukar	58	Dokumen	250.000.000	APBD		58	OPD	250.000.000
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD Kab. Kukar	2	Dokumen	-	APBD		58	OPD	135.000.000
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD Kab. Kukar	2	Dokumen	-	APBD		58	OPD	135.000.000
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	800.000.000	APBD		1	Raperda	800.000.000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		1	Dokumen		APBD		1	Raperbup	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	800.000.000	APBD		1	Raperda	800.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		1	Dokumen		APBD		1	Raperbup	-
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	BPKAD Kab. Kukar	1	Raperbup	300.000.000	APBD		1	Raperbup	300.000.000
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKAD Kab. Kukar	1	Laporan	200.000.000	APBD		1	Laporan	200.000.000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1	Laporan	500.000.000	APBD		1	Laporan	500.000.000
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPKAD Kab. Kukar	1	Laporan	250.000.000	APBD		1	Laporan	250.000.000
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten	BPKAD Kab. Kukar	58	OPD	270.000.000	APBD		58	OPD	-
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan disajikan tepat waktu	BPKAD Kab. Kukar	100	%	1.080.911.910	APBD				1.080.911.910
		Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi		100	%						

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
		Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP		100	%						
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	79.545.455	APBD		1	Laporan	79.545.455
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Laporan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD Kab. Kukar	1	Laporan	60.000.000	APBD		1	Laporan	60.000.000
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD Kab. Kukar	12	Dokumen	213.075.000	APBD		12	Dokumen	213.075.000
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan	Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	85.700.000	APBD		1	Dokumen	85.700.000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
	Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Bank									
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait K	BPKAD Kab. Kukar	10000	Dokumen	49.982.000	APBD		10000	Dokumen	49.982.000
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	232	Orang	592.609.455	APBD		58	OPD	592.609.455
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaan	BPKAD Kab. Kukar	100	%	1.308.733.126	APBD		100	%	1.308.733.126

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
		daerah									
		Persentase Transaksi Non Tunai		100	%				100	%	
		Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu		100	%				100	%	
		Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan		100	%				100	%	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1	Laporan	162.712.000	APBD		1	Dokumen	162.712.000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	BPKAD Kab. Kukar	2	Dokumen	50.000.000	APBD		2	Dokumen	50.000.000
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD Kab. Kukar	3	Laporan	60.000.000	APBD		2	Dokumen	60.000.000
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	BPKAD Kab. Kukar	3	Laporan	599.999.800	APBD		4	Dokumen	599.999.800

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	2	Dokumen	199.999.800	APBD		1	Raperda	199.999.800
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	116	Orang	236.021.526	APBD		116	Orang	236.021.526

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa	BPKAD Kab. Kukar	100	%	818.008.249.179	APBD		100	%	486.218.410.314
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD Kab. Kukar	6	Laporan	50.000.000.000	APBD		6	Laporan	10.000.000.000
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	10	Laporan	768.008.249.179	APBD		10	Laporan	476.218.410.314
5,02,03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	100	%	2.129.537.590	APBD		100	%	2.129.537.590
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016	BPKAD Kab. Kukar	100	%	2.129.537.590	APBD		100	%	2.129.537.590

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
		Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan		100	%				100	%	
		Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD		100	%				100	%	
		Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD		100	%				100	%	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	BPKAD Kab. Kukar	2	Dokumen	345.866.000	APBD		2	Dokumen	345.866.000
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	BPKAD Kab.	1	Dokumen	100.000.0	APBD		1	Dokumen	100.000.00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
		Kebutuhan BMD	Kukar			00					0
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1	Laporan	230.800.000	APBD		1	Laporan	230.800.000
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1	Laporan	163.746.000	APBD		1	Laporan	163.746.000
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1	Laporan	414.187.240	APBD		1	Laporan	414.187.240
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jakarta dan Kutai Kartanegara	2	Dokumen	749.938.350	APBD		2	Dokumen	749.938.350

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1	Laporan	75.000.000	APBD		1	Laporan	75.000.000
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	BPKAD Kab. Kukar	1	Laporan	50.000.000	APBD		1	Laporan	50.000.000
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan Pengelolaan BMD	BPKAD Kab. Kukar	8	OPD	-	APBD		8	OPD	-
		TOTAL				901.095.114.020		TOTAL			533.409.557.437

BAB V
PENUTUP

Renja BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 memuat tentang program, kegiatan dan target-target capaian sasaran yang harus dicapai pada tahun 2025. Rencana Kerja ini selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPKAD. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf kearah yang lebih baik dimasa datang.

Untuk dapat merealisasikan maksud tersebut, diperlukan adanya dukungan sumber daya aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang profesional dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugasnya dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas aparatur di seluruh OPD, terkait dengan pelaporan keuangan dan aset OPD dalam penyusunan laporan keuangan yang akan dikompilasi menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Dengan mensinergikan berbagai aspek yang ada, maka diharapkan dapat menunjang dan memperkuat kemampuan dan kehandalan atas laporan keuangan, agar bisa terwujud secara maksimal selaku instansi yang mendukung pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka akan dilaksanakan pembinaan terhadap sumber daya aparatur di seluruh OPD, sehingga mampu menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang akuntabel sehingga opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dapat terwujud.

b.RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional diarahkan untuk mengembangkan antara kota dan desa, antar sektor mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, ideologi dan situasi kondusif daerah yang sangat prioritas dalam pembangunan dewasa ini.

Dalam upaya mengurangi dampak yang ditimbulkan dari semua unsur tersebut, maka penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik perlu mengambil langkah-langkah guna membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan menyiapkan strategi dan kebijakan.

Untuk itu diperlukan suatu perencanaan kerja berdasarkan analisis terhadap permasalahan diatas pada Tahun 2025 yang akan datang, berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada pelaksanaan pembangunan Tahun kedua RPJMD 2021-2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu proses mempersiapkan program dan kegiatan yang akan dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan organisasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam proses perencanaan kerja Tahunan tentunya tidak terlepas dari rencana strategis yang telah dibuat sebagai acuan kerja dalam 5 (lima) Tahun ke depan dan pada Tahun 2025 sebagaimana renstra yang ada akan lebih fokus kepada pemeliharaan situasi kondusif di dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara pasca pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, Pelaksanaan tugas Paskibraka, Pembinaan Wawasan Kebangsaan, Penguatan Forum-Forum Bentukan Pemerintah, Fasilitasi Pelaksanaan P4GN serta mendukung pembangunan Ibu Kota Negara.

Sebagai langkah awal, diperlukan upaya penyempurnaan matriks struktur program dan kegiatan melalui penetapan indikator kinerja. Hasil dari penyusunan ini akan diimplementasikan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang

berfokus kepada Pemberdyaan Masyarakat dengan tema pembangunan “Pemantapan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Akselerasi dan Transformasi Pembangunan” dengan prioritas dan focus pembangunan sebagai berikut :

1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
    a. Penataan manajemen keuangan dan asset daerah
    b. Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu berbasis IT
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Produktif, Terampil
    a. Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu
    b. Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan
3. Percepatan Pembangunan Desa dan Kawasan Pembangunan Desa

    Penguatan Kecamatan Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan Kawasan Startegis Daerah
4. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Angkatan Kerja

    Pengembangan kewirausahaan dan manajemen bisnis bagi kaum muda.
5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, bernilai tambah dan berkelanjutan
    a. Peningkatan Produktivitas pariwisata berbasis alam, sosial Budaya dan olah raga berkelanjutan.
    b. Peningkatan Produktivitas Industri Kreatif
6. Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN

    Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat;
14. Peraturan Menteri Dalam Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

21. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3 Maksud danTujuan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dimaksudkan untuk meletakan landasan bagi sistem perencanaan dan penganggaran yang mampu menjamin arah pembangunan dan memiliki akuntabilitas kinerja yang terukur pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025;
2. Meletakan prinsip dasar dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara secara terkoordinasi, terpadu dan tepat waktu serta sasaran yang diinginkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD:

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan

peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Laludan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian Tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD Tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, Dampaknya terhadap visi dan misi Kepala Daerah, Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD dan Formulasi penting berupa rekomendasi dan catatan untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2025.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan penjelasan mengenai alasan proses

tersebut dilakukan, Penjelasan temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III. TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V. PENUTUP

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sebagaimana disebutkan dalam Perubahan Renstra Badan Kesbangpol 2021-2026, pada Tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 4 (empat) Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 4 (empat) Indikator Kinerja Utama.

Badan Kesbangpol bertugas menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri untuk membantu Bupati menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Terkait dengan hal tersebut, selama 5 (lima) Tahun pelaksanaan RPJMD 2021 – 2026, Badan Kesbangpol telah melaksanakan berbagai program dukungan terhadap pembangunan daerah meliputi penanganan konflik, melakukan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan pancasila, peningkatan partisipasi politik masyarakat, pengaturan database ormas dan parpol. Berikut tabel capaian kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2023 :

PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI 2023	% PENC.	KETERANGAN
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	63,50	41,85	67,32%	Hasil Penilaian Mandiri, sambil hasil penilaian dari inspektorat
Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak	25	14	132%	merupakan angka capaian penurunan jumlah konflik dan gejolak
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki	2,99	3,99	133,44%	Kegiatan pembinaan kepada masyarakat

Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas	pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas				dan aparatur telah dilaksanakan seluruhnya dengan jumlah peserta dan tingkat pemahaman yang sangat baik dan jumlah peserta melebihi dari target renstra
Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	4,5	5,71	126,89%	Kegiatan Pendidikan Politik dilaksanakan di seluruh kecamatan terdiri dari Perempuan, Pelajar dan Masyarakat dengan jumlah peserta melebihi dari target renstra

PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2023

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI 2023	% PENC.	KETERANGAN
Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100%	100%	Data dasar Jumlah Konflik dan gejolak masyarakat dan kejadian konflik pada Tahun 2023 dapat diatasi, hal ini bisa diartikan bahwa keadaan sutuasi di Kutai Kartanegara kondusif

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI 2023	% PENC.	KETERANGAN
Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	1,78%	2,19%	123%	kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan aparatur telah dilaksanakan dengan tingkat kehadiran peserta yang melebihi target
Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud	1,21%	1,77%	146%	kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan aparatur telah dilaksanakan dengan tingkat kehadiran peserta yang melebihi target.
Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	11,62 %	14,76 %	127%	kegiatan pendidikan politik telah dilaksanakan dengan tingkat kehadiran peserta yang melebihi target
Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang tertib administrasi	9,9%	9,8%	98,99%	Dari target 25 ormas telah terpenuhinya 21 ormas yang telah tertib administrasi dalam perpanjangan dan pendaftaran serta pelaporan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 nilai	95,20 nilai	109	Nilai SAKIP hasil reviu Tahun 2022

Secara keseluruhan, Badan Kesbangpol berhasil melaksanakan tugas, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian target kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2023, dengan perhitungan bahwa terdapat 4 (empat) indikator kinerja realisasinya melebihi target sasaran, dan 1 (satu) indikator kinerja yang realisasinya memenuhi target sasaran, dan terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang realisasinya tidak

mencapai target.

Capaian kinerja Badan Kesbangpol secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil memenuhi target kinerja yang dijanjikan pada awal Tahun, capaian pada Tahun 2023 dan lebih baik dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2022

Dalam hal pencapaian output program dan kegiatan Tahun anggaran 2023 dengan rincian realisasi kinerja sebesar 97,99 % dan realisasi keuangan sebesar 93,28 %, untuk selengkapnya terlampir dalam laporan ini

Secara keseluruhan pencapaian target renja dan renstra yang tercapai, tidak tercapai dan melebihi target serta faktor-faktor penyebab dan tindak lanjut terhadap capaian target program dan kegiatan pada Tahun 2023, secara keseluruhan disampaikan sebagai berikut :

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Target Tahun 2023				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai	87	95,20	109	Adanya perbaikan dari hasil evaluasi Tahun sebelumnya	Reviu terhadap SOP pengumpulan data kinerja
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100	Tertibnya Pengumpulan data kinerja dan pelaporan tepat waktu	Kepatuhan SOP
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100	Tertibnya Pengumpulan data kinerja dan pelaporan tepat waktu	Kepatuhan SOP
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	100	Tertibnya Pengumpulan data kinerja dan pelaporan tepat waktu	Kepatuhan SOP
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	20	20	100	Tertibnya penatausahaan keuangan dan pelaporan	Kepatuhan SOP
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln	900	900	100	Terdapat ASN yang pensiun dan meninggal serta pindah tugas	Kepatuhan SOP
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100	Tertibnya penatausahaan keuangan dan pelaporan	Kepatuhan SOP
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	18	100	Tertibnya penatausahaan keuangan dan pelaporan	Kepatuhan SOP
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100	Tertibnya penatausahaan BMD dan pelaporan	Kepatuhan SOP
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	3	100	Tertibnya penatausahaan BMD dan pelaporan	Kepatuhan SOP
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100	Tertibnya pelaporan data dan kepangkatan ASN Kesbangpol	Kepatuhan SOP
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	195	189	96,92	Jumlah peserta sosialisasi sesuai target	Kepatuhan SOP
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	75	25	33,33	Jumlah peserta sosialisasi sesuai target	Kepatuhan SOP
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	6	6	100	Tertibnya pelaksanaan layanan	Kepatuhan SOP

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Target Tahun 2023				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	5	5	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	29	29	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	19	19	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	5	5	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	600	600	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2.220	2.220	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	170	170	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	85	85	Kelengkapan administrasi barang yang masih belum lengkap	Proses pemenuhan kelengkapan administrasi barang
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	30	15	50	Sebagian kendaraan operasional masih dapat dioptimalkan	Diperlukan pencatatan masa operasional kendaraan secara berkala
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	40	3	7,50	Kelengkapan surat kendaraan untuk pengurusan belum ditemukan	Pengusulan kemudahan administrasi pada Samsat untuk kendaraan dinas

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Target Tahun 2023				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	43	35	81,40	Sebagian peralatan operasional masih dapat dioptimalkan	Diperlukan pencatatan masa operasional peralatan secara berkala
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	3	3	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
II	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persen	1,78	2,19	123	Kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan aparatur telah dilaksanakan seluruhnya dengan jumlah peserta dan tingkat pemahaman yang sangat baik	Melaksanakan Program Pendidikan Wawasan Kebangsaan melalui sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat dan tokoh agama serta melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta bersama FPK dan FKUB
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dok/Bln	12	12	100	Pelaksanaan dokumen pelaporan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	1.800	1.800	100	Metode pelaksanaan dan materi yang disampaikan lebih fokus dan dapat dipahami dengan baik	Diperlukan inovasi setiap Tahunnya agar tidak monoton dan lebih menyesuaikan dengan karakteristik peserta
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	400	400	100	Metode pelaksanaan dan materi yang disampaikan lebih fokus dan dapat dipahami dengan baik	Diperlukan inovasi setiap Tahunnya agar tidak monoton dan lebih menyesuaikan dengan karakteristik peserta

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Target Tahun 2023				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
III	PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persen	11,62	14,76	127	Kegiatan Pendidikan Politik dilaksanakan di seluruh kecamatan terdiri dari Perempuan, Pelajar dan Masyarakat dengan jumlah peserta melebihi dari target renstra	Melakukan kerjasama dengan partai politik dan lembaga pendidikan dalam peningkatan pendidikan politik kepada aparatur dan masyarakat
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Dok/Bln	12	12	100	Pelaksanaan dokumen pelaporan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	5.400	5.400	100	Sikap apatis masyarakat terhadap dunia politik dan pendidikan politik belum menjangkau wilayah pedesaan	Diperlukan inovasi setiap Tahunnya agar tidak monoton dan lebih menyesuaikan dengan karakteristik peserta serta lokasi pelaksanaan bisa menjangkau daerah pedesaan dan pemukiman perusahaan
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	30	30	100	Parpol telah memenuhi kelengkapan administrasi dan telah menyelesaikan pertanggung jawaban	Peningkatan kapasitas dan pemahaman partai politik terhadap peningkatan pendidikan politik
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Laporan	48	28	58,33	Pelaksanaan monev telah dilaksanakan	Diperlukan upaya peningkatan analisis

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Target Tahun 2023				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						pelaporan perkembangan politik
IV	PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persen	9,9	9,8	99	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Melakukan sosialisasi peratura perundang-undangan tentang organisasi kemasyarakatan pada wilayah yang terdata banyak ormas
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen	20	20	100	Dokumen sesuai dengan jumlah dokumen ormas yang terregistrasi	Diperlukan peningkatan sosialisasi tentang pentingnya pelaporan keberadaan ormas
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	75	60	80	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Melakukan sosialisasi peratura perundang-undangan tentang organisasi kemasyarakatan pada wilayah yang terdata banyak ormas
V	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persen	1,21	1,77	146	Kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan aparatur telah dilaksanakan seluruhnya dengan jumlah peserta dan tingkat pemahaman yang sangat baik	Melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan serta Tes Urine terhadap ASN dan Masyarakat serta pembentukan Desa dan Sekolah Bersinar (Bersih Narkoba) di 11 Desa dan 2 Sekolah
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Dok/Tri	5	5	100	Pelaksanaan dokumen pelaporan sesuai target	Kepatuhan SOP

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Target Tahun 2023				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	3.000	2.546	84,87	Sikap apatis masyarakat terhadap ketahanan ekososbud dan belum menjangkau wilayah pedesaan	Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga pendidikan dalam peningkatan pemahaman ketahanan ekososbud kepada aparatur dan masyarakat
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	22	22	100	Pelaksanaan monev telah dilaksanakan	Diperlukan upaya peningkatan analisis pelaporan ketahanan ekososbud
VI	PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persen	100	100	100	Terjalinnya koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan dalam penanganan konflik dan peran forum-forum bentukan pemerintah (FPK,FKUB dan FKDM)	Telah dilakukan upaya melalui pendidikan dan pelatihan dasar deteksi dini dan pelaporan serta monitoring deteksi dini terhadap dampak yang akan timbul dari potensi kerawanan yang mengganggu situasi kondusifitas daerah serta penyusunan dokumen ketahanan ekonomi
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dok/Bln	12	12	100	Pelaksanaan dokumen pelaporan sesuai target	Kepatuhan SOP
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Orang	500	500	100	Terjalinnya koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan dalam penanganan konflik dan peran	Diperlukan analisis yang lebih detail terhadap hasil deteksi dini yang akan berdampak

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Target Tahun 2023				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
	Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					forum-forum bentukan pemerintah (FPK,FKUB dan FKDM)	pada pengambilan kebijakan selanjutnya
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	50	35	70	Terjalinnya koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan dalam penanganan konflik dan peran forkopimda	Peningkatan jalin koordinasi antar instansi vertikal

Dalam Tahun 2023 pencapaian program kegiatan sebagaimana yang telah disampaikan pada tabel diatas, tentunya memiliki implikasi terhadap target capaian pada rencana strategis Badan Kesbangpol, adapun implikasi yang timbul terhadap capaian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dari seluruh program hanya terdapat 1 program yang tidak mencapai target, sehingga akan menghambat pencapaian pada akhir renstra
2. Pada program lainnya capaian yang melebihi target akan dilakukan evaluasi lagi terkait perubahan atau penambahan target kinerja
3. Secara keseluruhan pada capaian renstra masih baik, karena masih berada pada Tahun pertama dan pada Tahun berikutnya akan dilakukan upaya pencapaian target
4. Diperlukan penyesuaian terhadap indikator dan satuan target

Dalam menghadapi capaian tersebut, tentunya terdapat permasalahan yang timbul di masyarakat yang harus diselesaikan dengan program dan kegiatan secara berkesinambungan dalam renstra kami yang dijabarkan ke dalam Renja

Dari penjabaran diatas, berikut kami sampaikan beberapa program dan kegiatan yang dilakukan penyesuaian terhadap Renja Tahun 2023:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

   Terdapat penyesuaian anggaran dan target kinerja pada kegiatan yang terdapat pada program ini, penyesuaian dilakukan untuk melakukan pergeseran anggaran kepada kegiatan lain dalam rangka memenuhi target kinerja.
2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

   Pada program ini dilakukan pergeseran dan penambahan pagu anggaran dalam sub kegiatan serta target kinerja dalam rangka memenuhi keperluan kegiatan Jejaring Panca Mandala dan persiapan Paskibraka

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

   Pagu kegiatan ini mengalami pergeseran dan penambahan terkait untuk keperluan Fasilitasi KPU dan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan workshop teknis penyelenggaran pemilu tingkat kecamatan tahapan pemilu 2024 dengan pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat dan upaya untuk mensinergikan langkah Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas kehidupan politik yang demokratis di Kabupaten Kutai Kartanegara serta hibah kepada penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Tahun 2024

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

   Pada program ini dilakukan pergeseran pagu anggaran dalam sub kegiatan serta target kinerja dalam rangka memenuhi keperluan kegiatan fasilitasi Bawaslu dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam pelaksanaan sosialisasi FKUB dan BAWASLU kabupaten kutai kartanegara menuju pemilu damai dan demokratis dan pelaksanaan rakor FKUB se-Kaltim serta pembelian test kit narkoba.

5. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

   Pada program ini dilakukan penambahan pagu anggaran serta target kinerja untuk keperluan pelaksanaan hari bela negara 2023 dan Pelaksanaan peningkatan kapasitas Anggota FKDM kabupaten kutai kartanegara serta sosialisasi pencegahan radikalisme bersama MUI dan Kemenag.

TABEL T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BADAN KESBANGPOL DAN

PENCAPAIAN RENSTRA BADAN KESBANGPOL s/d TAHUN 2024

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) Tahun 2021 - 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN 2024			
							TARGET RENJA PD TAHUN 2023		REALISASI RENJA PD TAHUN 2023		TINGKAT REALISASI				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9		10 = 5+7+9		11 = 10/4x100	
			K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan
8.01	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	90	Nilai	86,16	Nilai	87	Nilai	95,2	Nilai	109,43	persen	88	Nilai	95,2	Nilai	105,78	persen

8.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	100	persen	6	dokumen	18	dokumen	60	persen
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100	persen	3	dokumen	9	dokumen	60	persen
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	laporan	3	laporan	3	laporan	3	laporan	100	persen	3	laporan	9	laporan	60	persen
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	100	laporan	20	laporan	20	laporan	20	laporan	100	persen	20	laporan	60	laporan	60	persen

8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	900	orang/bulan	836	orang/bulan	900	orang/bulan	900	orang/bulan	100,00	persen	900	orang/bulan	900	orang/bulan	100	persen
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100	persen	1	laporan	3	laporan	60	persen
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90	laporan	18	laporan	18	laporan	18	laporan	100	persen	18	laporan	54	laporan	60	persen
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	15	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100	persen	3	dokumen	9	dokumen	60	persen
8.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	15	laporan	3	laporan	3	laporan	3	laporan	100	persen	3	laporan	9	laporan	60	persen

8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	20	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100	persen	4	dokumen	12	dokumen	60	persen
8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	375	orang	75	orang	75	orang	25	orang	33,33	persen	75	orang	175	orang	46,66667	persen
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	30	layanan	6	layanan	6	layanan	6	layanan	100	persen	6	layanan	18	layanan	60,00	persen
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20	paket	4	paket	5	paket	5	paket	100	persen	4	paket	13	paket	65	persen
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapa	145	paket	33	paket	29	paket	29	paket	100	persen	29	paket	91	paket	62,75862	persen

		n Kantor yang disediakan																
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	152	paket	19	paket	19	paket	19	paket	100	persen	38	paket	76	paket	50,00	persen
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	21	paket	8	paket	5	paket	5	paket	100	persen	6	paket	19	paket	90,48	persen
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	1175	laporan	300	laporan	600	laporan	600	laporan	100,00	persen	600	laporan	1500	laporan	127,66	persen
8.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada	11940	dokumen	2220	dokumen	2220	dokumen	2220	dokumen	100,00	persen	2500	dokumen	6940	dokumen	58,12	persen

		unit kearsipan (UK)															
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen
8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Barang Milik Daerah	37	unit	35	unit	170	unit	170	unit	100,00	persen	42	unit	247	unit	667,5676	persen
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100	persen	12	bulan	12	bulan	100	persen
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	12	laporan	0	laporan	12	laporan	12	laporan	100	persen	12	laporan	12	laporan	100	persen
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100	persen	12	laporan	12	laporan	100	persen

		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
8.01.01.2.01.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100	persen	12	laporan	12	laporan	100	persen
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	30	unit	26	unit	30	unit	15	unit	50,00	persen	20	unit	30	unit	100	persen

8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	40	unit	26	unit	40	unit	3	unit	7,50	persen	45	unit	40	unit	100	persen
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	43	unit	38	unit	43	unit	35	unit	81,40	persen	43	unit	43	unit	100	persen
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	2	unit gedung	3	unit gedung	3	unit gedung	3	unit gedung	100	persen	3	unit gedung	2	unit gedung	100	persen

8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	2,34	Persen	1,64	Persen	1,78	Persen	2,19	Persen	123,03	persen	1,99	Persen	2,19	Persen	93,59	persen
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	60	dokumen/bulan	12	dokumen/bulan	12	dokumen/bulan	12	dokumen/bulan	100	persen	12	dokumen/bulan	36	dokumen/bulan	60	persen
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan/ Penyuluhan	2550	orang	750	orang	1800	orang	1800	orang	100,00	persen	3500	orang	6050	orang	237,25	persen

8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan/ Penyuluhan	2000	orang	400	orang	400	orang	400	orang	100,00	persen	1000	orang	1800	orang	90	persen
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	14,75	Persen	11,9	Persen	11,62	Persen	14,76	Persen	127,02	persen	14,27	Persen	14,76	Persen	100,07	persen

8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri	60	dokumen/bulan	12	dokumen/bulan	12	dokumen/bulan	12	dokumen/bulan	100	persen	12	dokumen/bulan	36	dokumen/bulan	60	persen
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/penyuluhan	7020	orang	1621	orang	5400	orang	5400	orang	100	persen	5500	orang	12521	orang	178,36	persen

	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah parpol yang difasilitasi terkait pembinaan, verifikasi,penyaluran dan monev bankeu parpol	16	orang	16	orang	30	orang	30	orang	100	persen	48	orang	30	orang	187,5	persen

8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik daerah	270	Laporan	24	Laporan	48	Laporan	28	Laporan	58,33	persen	700	Laporan	752	Laporan	278,52	persen
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang tertib administrasi	14,4	Persen	8,8	Persen	9,9	Persen	9,8	Persen	98,99	persen	11,4	Persen	9,8	Persen	68,06	persen
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi	130	dokumen	17	dokumen	20	dokumen	20	dokumen	100,00	persen	30	dokumen	67	dokumen	51,54	persen

	Organisasi Kemasyarakatan	Kemasyarakatan																
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas yang difasilitasi	145	orang	17	orang	75	orang	60	orang	80,00	persen	300	orang	377	orang	260,00	persen
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud	1,58	Persen	1,25	Persen	1,21	Persen	1,77	Persen	146,28	persen	1,33	Persen	1,77	Persen	112,03	persen
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi,	25	dokumen/triwulan	5	dokumen/triwulan	5	dokumen/triwulan	5	dokumen/triwulan	100	persen	5	dokumen/triwulan	15	dokumen/triwulan	60	persen

		Sosial Dan Budaya																
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan/ Penyuluhan	3000	orang	1387	orang	3000	orang	2546	orang	84,87	persen	1400	orang	5333	orang	177,77	persen
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	Jumlah laporan pemantauan ketahanan ekososbud	98	laporan	22	laporan	22	laporan	22	laporan	100	persen	22	laporan	66	laporan	67,35	persen

	Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	persen	100	Persen	100	Persen	100	persen
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	60	dokumen/bulan	12	dokumen/bulan	12	dokumen/bulan	12	dokumen/bulan	100	persen	12	dokumen/bulan	36	dokumen/bulan	60	persen

8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan kewaspadaan dini dan penanganan konflik	1550	orang	350	orang	500	orang	500	orang	100	persen	1000	orang	1850	orang	119,35	persen
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan fasilitasi forkopimda	250	dokumen	50	dokumen	50	dokumen	35	dokumen	70,00	persen	50	dokumen	135	dokumen	54,00	persen

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2023 diperoleh dari pembandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2023 dengan realisasinya. Berikut capaian kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2023 di setiap indikator kinerja :

Tujuan 1 :

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Badan Kesbangpol.

Sasaran Strategis I : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis I sebagaimana diatas, diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja. Gambaran dan analisis pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis I

Indikator Sasaran	Target	Realisasi		
		2021	2022	2023
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86	77,83	86,16	95,20

Dari indikator tersebut diatas, bahwa setiap Tahun hasil capaian mengalami peningkatan, dimana hal ini disebabkan beberapa faktor salah satunya terkait dengan pelaksanaan perbaikan hasil evaluasi Tahun sebelumnya, berikut analisis dari indikator tersebut:

a. Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Administrasi perkantoran merupakan salah satu bagian dari manajemen yang memberikan informasi layanan di bidang administrasi perkantoran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan mampu memberikan dampak kelancaran pada operasional suatu OPD dan memperlancar pekerjaan para aparatur di dalamnya. Secara keseluruhan pelayanan terhadap administrasi perkantoran sudah baik,

namun dilihat dari capaian indikatornya tidak memenuhi target, hal ini disebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak selesai karena disesuaikan pada keadaan dan kebutuhan pelayanan administrasi pada saat itu, secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN	TARGET	CAPAIAN	REALISASI
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29 jenis	29 jenis	100,00%
Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	40 unit	3 unit	7,50%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 orang	25 orang	33,33%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43 unit	35 unit	81,40%

Selain dari uraian diatas, untuk uraian lain yang berhubungan dengan pelayanan administrasi perkantoran telah terlaksana dengan baik atau telah tercapai dari yang ditargetkan seperti ATK, Cetakan, makanan dan minuman dan rapat-rapat koordinasi. Terkait tidak tercapainya target dari uraian diatas dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam hal pelaksanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor masih terdapat sisa perlengkapan yang tidak digunakan.
2. Dalam Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, terdapat 7 (tujuh) unit kendaraan yang BPKB masih dalam penelusuran.
3. Dalam Penataan Arsip Perangkat Daerah, terdapat 1 (satu) jenis barang yang tidak terealisasi.

Dengan adanya kendala tersebut maka capaian kinerja indikator ini dalam Tahun 2023 mengalami kenaikan, namun hal ini bukan menjadi faktor kegagalan karena belanja untuk kegiatan pelayanan administrasi perkantoran disesuaikan dengan kebutuhan. Dan secara keseluruhan proses layanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik dan seluruh keperluan pada Tahun 2023 telah terpenuhi. Dan pada Tahun 2024 capaian akan ditingkatkan lagi sesuai dengan hasil evaluasi yang ada.

b. Pengadaan dan Pemeliharaaan BMD

Secara umum sarana dan prasana yang dimiliki oleh Badan Kesbangpol Kab. Kutai Kartanegara, cukup memadai dalam seluruh kegiatan operasional selama ini. Namun dipandang perlu untuk menambah sarana dan prasarana pendukung lainnya untuk memperbaiki tingkat pelayanan ke masyarakat dan akuntabilitas publik.

Adapun sarana dan prasarana pendukung yang di pandang perlu untuk memperbaiki tingkat pelayanan ke masyarakat dan akuntabilitas publik, adalah sebagai berikut :

1. Perlu membangun system/aplikasi berbasis komputer dalam pengelolaan database yang terintegrasi, yang dapat mengelola data parpol, ormas dan potensi konflik ipoleksosbud yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.
2. Kendaraan Operasional untuk pelaksanaan tugas ke wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
3. Sarana dan prasarana peralatan kerja banyak yang dalam keadaan rusak berat sehingga perlu diadakan penggantian
4. Sarana untuk penunjang penataan kearsipan belum memadai sehingga perlu dilengkapi
5. Adapun sarana dan prasarana pada Badan Kesbangpol sebagai berikut :

Sarana dan Prasarana SKPD

No	Nama Barang	Jumlah	Tahun	Kondisi Barang
1	Kendaraan Roda Empat	6	2013	Baik
2	Kendaraan Roda Dua	33	2013	Baik
3	Mesin Foto Copy	1	2013	Baik
4	Filling Kabinet	10	2012	Baik
5	Lemari Kaca	2	2013	Baik
6	Penghancur Kertas	2	2014	Baik
7	Papant Tulis	1	2013	Baik
8	AC	30	2014	Baik
9	Televisi	14	2013	Baik
10	Sound System	1	2013	Baik
11	Dispenser	8	2013	Baik

12	CCTV	4	2013	Baik
13	PC	20	2014	Baik
14	Printer	20	2014	Baik
15	UPS	10	2014	Baik

Sarana dan prasarana yang digunakan aparatur pada Tahun 2023 tidak banyak mengalami perubahan karena Pada Tahun 2023 pelaksanaan pengadaan keperluan Badan Kesbangpol telah terpenuhi.

c. Pelaksanaan Administrasi Pelaporan BMD

Pengelolaan aset BMD dan capaian kinerja mempunyai standar baku yaitu disamping tepat penggunaan dan pelaksanaanya juga tepat waktu dalam penyelesaian pertanggungjawaban dan pelaporannya. Dampak dari ketidaktepatan waktu secara internal akan mengganggu perputaran ketersediaan dana dan capaian kinerja yang dibutuhkan pada saat itu, sedangkan secara eksternal ketidaksesuaian pelaporan dan ketepatan pertanggungjawaban akan mempengaruhi pemberian opini oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk menuju kondisi ketepatan penggunaan dan pelaksanaan, ketepatan waktu pertanggungjawaban dan pelaporan tersebut telah ditempuh langkah konkrit antara lain:

a. Mengupayakan ketepatan pelaporan BMD

Peranan unit kerja sebagai pemakai anggaran di dalam proses revolfing sangat penting, karena cepat lambatnya pengajuan revolfing sangat tergantung dari kelengkapan dan kebenaran dokumen pemakaian aset yang disampaikan ke Bagian Umum.

b. Ketepatan pertanggungjawaban

Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyusunan Laporan BMD sampai dengan akhir Tahun anggaran 2023 Laporan BMD yang dibuat telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan, terdiri dari :

1. 2 (dua) dokumen Laporan BMD Semesteran

2. 1 (satu) dokumen Laporan Barang Milik Daerah Akhir Tahun

Capaian kinerja indikator ini dalam Tahun 2022 sebesar 100%, dan di Tahun 2023 tetap dipertahankan dimana capaianya sebesar 100%

d. Pelaksanaan Administrasi Pelaporan Keuangan

Pengelolaan keuangan dan capaian kinerja mempunyai standar baku yaitu disamping tepat penggunaan dan pelaksanaanya juga tepat waktu dalam penyelesaian pertanggungjawaban dan pelaporannya. Dampak dari ketidaktepatan waktu secara internal akan mengganggu perputaran ketersediaan dana dan capaian kinerja yang dibutuhkan pada saat itu, sedangkan secara eksternal ketidaksesuaian pelaporan dan ketepatan pertanggungjawaban akan mempengaruhi pemberian opini oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk menuju kondisi ketepatan penggunaan dan pelaksanaan, ketepatan waktu pertanggungjawaban dan pelaporan tersebut telah ditempuh langkah konkrit antara lain:

a. Mengupayakan ketersediaan kecukupan dana (*cash flow)*

Pada awal Tahun anggaran Badan Kesbangpol mendapat Uang Persediaan (UP) dari Bendahara umum Daerah sebesar Rp350.000.000,-. Untuk kesinambungan ketersediaan UP maka dibutuhkan kecepatan proses administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana dari UP hingga mencapai batas minimum 30% dari pagu UP untuk kemudian dilakukan revolfing atau ganti uang persediaan. Peranan unit kerja sebagai pemakai anggaran di dalam proses revolfing sangat penting, karena cepat lambatnya pengajuan revolfing sangat tergantung dari kelengkapan dan kebenaran dokumen pemakaian anggaran yang disampaikan ke Bagian Keuangan.

b. Ketepatan penggunaan anggaran dan ketepatan pertanggungjawaban

Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyusunan Laporan Keuangan sampai dengan akhir Tahun anggaran 2023 Laporan Keuangan yang dibuat telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan, terdiri dari :

1. 12 (dua belas) dokumen Laporan Keuangan Bulanan;
2. 4 (empat) dokumen Laporan Keuangan Triwulan;
3. 2 (dua) dokumen Laporan Keuangan Semesteran;dan
4. 1 (satu) dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun.

Capaian kinerja indikator ini dalam Tahun 2022 sebesar 100%, dan di Tahun 2023 tetap dipertahankan dimana capaianya sebesar 100%

e. Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Badan Kesbangpol

Dalam sebuah penyusunan dokumen perencanaan diperlukan konsistensi dalam penyusunan dokumen turunan dari perencanaan 5 Tahunan ke perencanaan 1 Tahun, sehingga akan mempermudah dalam melakukan pengukuran kinerja

Untuk menuju konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut telah ditempuh langkah konkrit sebagai berikut :

a. Penyelesaian Rencana Kerja dan Capaian Kinerja SKPD

Dokumen rencana kerja yang telah dibuat pada Tahun 2023 dan juga untuk Tahun 2024 telah selesai sebelum proses musrenbang sehingga aspirasi yang masuk telah ditampung dan direaliasikan dalam bentuk program dan kegiatan OPD yang menyentuh kepada masyarakat, demikian juga dengan pelaporan

capaian kinerja untuk LKjIP pada Tahun 2023 telah diselesaikan tepat waktu namun belum mendapat nilai karena belum dilakukan reviu oleh Inspektorat, sedangkan laporan kinerja untuk setiap bulan kepada BAPPEDA Kutai Kartanegara telah dipenuhi melalui aplikasi E-Pantau.

Sampai dengan akhir Tahun 2023 telah dibuat RENJA 2024, LKjIP 2022, LPPD 2022 dan laporan capaian kinerja bulanan Tahun 2023 baik secara manual baik melalui aplikasi E – PANTAU dan telah dilaporkan 12 laporan capaian kinerja dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan (100%)

b. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD selama Tahun 2023 telah dilakukan monitoring oleh tim internal OPD agar mempermudah dalam kontrol apakah telah sesuai dengan program dan target kinerja yang telah ditetapkan, setelah itu setiap bulan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan bulan berikutnya akan dilakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi, terutama terkait dengan hasil dan dampak dari kegiatan tersebut terhadap kelompok sasaran kegiatan. Dengan demikian seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai hasil yang diharapkan kepada masyarakat khususnya. Dalam Tahun 2023 terdapat 31 kegiatan yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan target yang ditetapkan (100%)

Capaian kinerja indikator ini dalam Tahun 2022 sebesar 100%, dan di Tahun 2023 tetap dipertahankan dimana capaianya sebesar 100%

Tujuan 2 :

Terwujudnya Situasi yang Kondusif di Kabupaten Kutai Kartanegara

Sasaran Strategis II : Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis II sebagaimana diatas,

diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti, Gambaran pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis II

Indikator Sasaran	Target	Realisasi		
		2021	2022	2023
Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%

Dari indikator tersebut diatas, telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, berikut analisis dari indikator tersebut :

Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti

Untuk capaian indikator Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti, Badan Kesbangpol telah berupaya melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan dan hasilnya memang terjadi kenaikan jumlah demo dan terjadi kasus yang mengarah SARA namun secara keseluruhan telah dilakukan penanganan sebagaimana tabel dibawah ini :

a. Data Gangguan dan Konflik

   Secara umum kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara di Tahun 2023 dalam kondisi yang sangat kondusif. Berdasarkan catatan bahan pengkajian permasalahan aktual daerah terdapat peningkatan jumlah aksi unjukrasa dibanding dengan Tahun 2022.

   Pada Tahun 2023 terdapat aksi unjukrasa sebanyak 26 kali aksi, sedangkan pada Tahun 2022 aksi unjukrasa sebanyak 40 kali aksi. Dengan permasalahan yang dominan adalah berlatar Kebijakan Pemerintah, kemudian masalah lahan masyarakat dengan perusahaan dan masalah kebijakan pemerintah dalam kaitan penyediaan dan penyalanan masyarakat. Berikut disajikan data-data rekapitulasi kejadian selama Tahun 2023.

Rekapitulasi Data Unjuk Rasa/Demo (berdasarkan latar belakang masalah)
di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	Latar Belakang Unjuk Rasa	Bulan (kali)												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Politik	1							1					2
2	Lahan / SDA	1			1				1			1	2	6
3	Sosial Budaya	1			1	1			1		1			5
4	Aksi Solidaritas peristiwa Kemanusiaan nasional/ internasional		1			1			1					3
5	Ekonomi	1												1
6	Kebijakan Pemerintah dan Pelayanan Publik							2	1					3
7	Ketenagakerjaan							1						1
8	Korupsi			1			1				1			3
9	Lingkungan Hidup		1				1							2
Jumlah Unjuk Rasa		4	2	1	2	2	2	3	5	0	2	1	2	26

Rekapitulasi Data Unjuk Rasa/Demo (berdasarkan kelompok aksi)
di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	Pelaku Unjuk Rasa	Bulan (kali)												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Mahasiswa (Organisasi & Kelompok Mahasiswa)	1		1	1	1	1	1	3					9
2	Gabungan Organisasi (Mahasiswa, Ormas, OKP, parpol dan Masy.)										1			1
3	Ormas / LSM	1	1	1			1	1	1		1			7
4	Elemen Masyarakat	2	1			1						1	2	7
5	Karyawan / Sarikat Pekerja							1	2					2
6	Organisasi Profesi													0
Jumlah Pelaku Unjuk Rasa		4	2	2	1	2	2	3	6	0	2	1	2	26

Berikut data kejadian sengketa hubungan industrial dan penanganan sengketa yang terjadi sepanjang Tahun 2023.

Rekapitulasi Data Sengketa Hubungan Industrial
di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	Jenis Sengketa	Bulan												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Sengketa Pengusaha dengan Perusahaan / Pemerintah													-
2	Sengketa Pekerja dan Pengusaha						1							1
3	Pemogokan Kerja													-
4	Penyelesaian Sengketa Buruh													
5	Mediasi Sengketa Perusahaan dan Masyarakat													
Jumlah Sengketa Hubungan Industrial		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1

A. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di daerah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat pada dasarnya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia serta perlu peningkatan peran masyarakat untuk lebih aktif.

Permasalahan ini memerlukan suatu penanganan terpadu dan jalan keluar yang cepat, tepat dan terukur. Guna mendukung hal tersebut, dibutuhkan penyediaan data dan informasi aktual serta akurat.Sehingga diperlukan langkah-langkah kegiatan yang sinergis.

Dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bagian dari pemerintah daerah yang sebagai leading sektor dalam koordinasi dalam menjaga keamanan di daerah. Hal ini dengan dibentuknya wadah/forum yang dapat mensinergikan seluruh kebijakan strategis berkenaan menjaga keamanan didaerah yaitu dengan dibentuknya:

1. Nama Forum : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dasar Hukum :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (AGHT) terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

4. Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pemantauan Orang asing dan Organisasi Masyarakat Asing di daerah.
5. Permendagri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pemantauan Tenaga Asing di daerah.
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/1514/SJ tanggal 9 Maret 2018 tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 370/SK-BUP/HK/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan :

1. Sebagai wadah/forum dalam pertukaran data dan informasi Intelijen sehingga dapat diolah menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada Pimpinan Daerah (sebagai User) untuk mengambil kebijakan lebih lanjut dalam menjaga kondusifitas daerah.
2. Dalam rangka meningkatkan sinergitas dalam pertukarkan data dan informasi tentang permasalahan yang bisa menjadi pemicu permasalahan konflik dimasing-masing OPD kemudian secara bersama

menganalisa data dengan informasi intelijen untuk dihasilkan sebuah rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh Kepala Daerah dalam mengambil kebijakan strategis.

3. Koordinasi yang dilakukan oleh Kominda berfungsi untuk memelihara hubungan baik dalam berbagai institusi lintas sektoral yang melibatkan banyak orang dari unsur intelijen.
4. Membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengkompilasi dan mengkoordinasi informasi bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Ketahanan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (IPOLEKSOSBUDHANKAM) yang berpengaruh terhadap segala aspek yang menjadi hambatan, gangguan dan acaman kondisi yang kondusif terhadap kebijakan politik dalam negeri di daerah.
5. Melakukan kompilasi tukar-menukar informasi intelijen dari berbagai instansi terkait sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut baik tindakan prefentif maupun refresif agar dapat mempertahankan kondisi yang kondusif.

Keanggotaan :

1. Bupati Kutai Kartanegara (Ketua 1)
2. Sekretaris DaerahKabupaten Kutai Kartanegara (Ketua 2)
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Ketua 3)
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretaris/Pelaksana Harian 1)
5. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretaris/Pelaksana Harian 2)
6. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretaris/Pelaksana Harian 2)
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara

9. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara
10. Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12. Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara Daerah Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Mahakam Ulu
13. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0906/TGR
14. Kasat Intelkam Kepolisian Resor Kutai Kartanegara
15. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara
16. Kepala Bagian Pemerintahan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara
18. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara
19. Kepala Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara
20. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara
21. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
22. Kepala Sub Bidang Pembauran Kebangsaan dan Kewarganegaraan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
23. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Nama Forum : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
3. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 460/964.SJ tertanggal 23 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu dalam melaksanakan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.
4. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 367/SK-BUP/HK/2021 tanggal 6 September 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan :

1. Mengkoordinasikan,mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
2. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadi konflik dan upaya penanganannya;
3. Melakukan upaya-upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
2. Merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik;
3. Mengkoordinasikan Pemerintah Kecamatan dan Desa dalam upaya penghentian konflik dalam skala Kecamatan;
4. Melakukan upaya pemulihan pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Keanggotaan :

1. Bupati Kutai Kartanegara (Ketua).
2. Wakil BupatiKutai Kartanegara (Wakil Ketua 1).
3. Sekretaris Daerah Kab Kukar (Wakil Ketua 2).
2. Kapolres Kutai Kartanegara (Wakil Ketua 3).
3. Dandim 0906/TGR (Wakil Ketua 4).
4. Kajari Kutai Kartanegara (Wakil Ketua 5).
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretaris).
6. Kepala Bagian Operasi Polres Kutai Kartanegara (Wakil Sekretaris 1).
7. Perwira Seksi Operasi Kodim 0906/TGR (Wakil Sekretaris 2).
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara.
14. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara.
15. Kepala Pos Daerah Badan Intelijen Negara Kabupaten Kutai Kartanegara.
16. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dab Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.
17. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.
18. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.

19. Kepala Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, Badan Kesatuan Bangsa Poltik Kabupaten Kutai Kartanegara.
20. Kepala Sub Bidang Pembauran Kebangsaan dan Kewarganegaraaan, Badan Kesatuan Bangsa Poltik Kabupaten Kutai Kartanegara.
21. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu, Badan Kesatuan Bangsa Poltik Kabupaten Kutai Kartanegara.
22. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa Poltik Kabupaten Kutai Kartanegara.
23. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Badan Kesatuan Bangsa Poltik Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kegiatan – Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah

   Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk melalui Surat Keputusan No. 370/SK-BUP/HK/2021 tanggal 7 September2021 yang bertujuan pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di daerah.

   Fungsi Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah dalam rangka :

   a. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di daerah; dan
   b. meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam pertukaran informasi kewaspadaan secara dini.

   Pendanaan kegiatan Kewaspadaan Dini Kabupaten Kutai Kartanegara melekat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara melalui :

Program : Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Jenis Kegiatan :

1. Pemantauan deteksi (AGHT) di 18 Kecamatan.
2. Melaksanakan Kegiatan fungsi intelijen, yakni penyelidikan, pengamanan dan penggalangan atas sebuah kasus.
3. Rapat Koordinasi pembahasan permasalahan aktual dan isu-isu strategis di daerah.
4. Pembuatan analisis dan rekomendasi (problem solving) atas permasalahan aktual dan isu-isu strategis di daerah untuk disampaikan kepada pimpinan daerah untuk diambil kebijakan lebih lanjut.
5. Pembentukan Anggota Jaring Kominda di setiap Kecamatan sebagai pengumpul bahan keterangan (pulbaket) informasi, agar infomasi dapat diperoleh secara cepat dan akurat (temu cepat, lapor cepat)

Koordinasi yang dilakukan oleh kominda dilakukan setiap bulan dan minimal setiap tiga bulan, untuk membahas isu-isu strategis atas informasi yang disampaikan oleh Anggota Jaring Agen Kominda di Kecamatan se-Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil Rapat Kominda disusun sebagai rekomendasi kepada Pimpinan Daerah (Bupati) atas isu-isu aktual dan strategis.

2. Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

   Kabupaten Kutai Kartanegara telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan diterbitkannya SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 197/SK-BUP/HK/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik.

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tugas sebagai berikut :

a. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten;
b. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
c. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadi konflik dan upaya penanganannya;
d. Melakukan upaya-upaya pencegahan melalui system peringatan dini;
e. Merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik;
f. Mengkoordinasikan Pemerintah Kecamatan dan Desa dalam upaya penghentian konflik dalam skala Kecamatan;
g. Melakukan upaya pemulihan pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi;

Untuk keterpaduan aksi pada masing-masing instansi yang bertanggung jawab atas tercapainya target maka kerangka kerja dari Tim Terpadu yang berisikan tahapan :

Pertama, Pembahasan Personalia Keanggotaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan pelibatan SKPD dan instansi vertikal didaerah yang terkait.

Kedua, Penetapan pembagian tugas SKPD sebagai dalam kegiatan :

1. Pencegahan Konflik.
2. Penghentian / Penyelesaian Konflik.
3. Pemulihan Pasca Konflik.

Ketiga, Penyusunan dan Pembahasan Rencana Aksi Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dan penetapan Instansi Vertikal/ SKPD yang bertanggung Jawab atas pelaksanaan Rencana Aksi.

RENCANA AKSI TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023

A. PENCEGAHAN
   1. Konflik Sosial
      a. Penanaman Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan dan Karakter (3 RA)
      b. SARA (2 RA)
      c. Politik (1 RA)
      d. Ekonomi / Industrial (1 RA)
   2. Dukungan Pelaporan Penanganan Pandemi Covid-19 (1 RA)

B. PENGHENTIAN / PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DAN TERORISME
1. Penghentian Konflik / Terorisme (4 RA)
2. Penyelesaian Konflik Sosial Dan Terorisme
   a. Sebelum Tahun 2023 (1 RA)
   b. Sejak Tahun 2023 (2 RA)

C. PERCEPATAN PENEGAKAN HUKUM
   a. Sebelum Tahun 2023 (2 RA)
   b. Sejak Tahun 2023 (2 RA)

D. FASILITASI FORKOPIMDA, KEWASPADAAN DINI DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUN 2023 (1 RA)
E. PELAPORAN PENANGANAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUN 2023 (1 RA)

Pada Tahun 2013 – 2014 pelaporan progress pelaksanaan rencana aksi terpadu disampaikan kepada Kemenko Polhukam / Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Pusat melalui sistem monitoring UKP4 seluruh data diupload (entry data) melalui website Serambi UKP4 : http://serambi.ukp.go.id. Dengan masa pelaporan B.03, B.06, B.09 dan B.12.

Mulai Tahun 2015 hingga Tahun 2023 pelaporan progress pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial dilaporkan secara manual kepada Sekretariat Tim Terpadu Provinsi melalui Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur dengan menyerahkan laporan berupa softcopy dan hardcopy data pendukung setiap rencana aksi yang dilaksanakan dengan masa pelaporan B04, B08 dan B12.

Masa Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi

Periode Pelaporan	Masa Pelaporan	Evaluasi Timdu Pusat
Periode B-04	27 April – 6 Mei 2023	5 Juni 2023
Periode B-08	27 Ags – 6 Okt 2023	8 September 2023
Periode B-12	27 Des – 6 Jan 2023	10 Januari 2024

Pada Tahun 2023 pelaporan progress capaian pelaksanaan rencana aksi penanganan konflik sosial dilaporkan melalui sistem penyimpanan data digital Google Drive yang dibangun oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur.

Semua data pendukung capaian target pelaksanaan rencana aksi diupload melalui akun : timdu_Kukar@gmail.com pada penyimpanan data digital Google Drive Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur.

Pendanaan kegiatan Tim Terpadu Penanganan konflik Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara melekat pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara melalui:

Program :

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Kegiatan :

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Jenis Kegiatan :

1. Pemantauan Pemantauan Gangguan Keamanan di 18 Kecamatan.
2. Melaksanakan Koordinasi penyelesaian konflik sosial dengan SKPD yang menjadi leading sektor terkait penyebab kejadiaan konflik.
3. Rapat Koordinasi pembahasan permasalahan aktual dan isu-isu strategis di daerah.
4. Mensinergikan seluruh kegiatan rencana aksi kepada Instansi Vertikal di daerah dan SKPD terkait sebagai

langkah memaksimalkan pencapaian target yang telah ditetapkan, sehingga dapat meminimalisir konflik yang muncul.

5. Melaporkan progres capaian pelaksanaan rencana aksi sesuai target yang telah ditetapkan.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah

Pengukuran realisasi kegiatan untuk kegiatan Fasilitasi Kewaspadaan Dini di daerah sangat sulit, karena output dari kegiatan tidak dapat diukur secara kuantitatif. Namun pengukuruan realisasi kegiatan kominda adalah sejauhmana fungsi dan peran Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dapat melakukan langkah deteksi dini dan cegah dini permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga permasalahan yang tidak menjadi konflik yang meluas dan diselesaikan secara cepat dan tepat.

Kegiatan deteksi dini yang dilaksanakan dengan menitik beratkan pada Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap Stabilitas Daerah dan Nasional, dengan bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan). Berikut ini disampaikan garis besar hasil pemantauan deteksi dini di Kabupaten Kutai Kartanegara selama Tahun 2023 :

Isu Strategis dan Permasalahan Aktul berdasarkan Pengumpulan Informasi Deteksi Dini

Bidang	Isu Strategis	Lokasi	Keterangan
Ideologi	1. Keberadaan Penganut Agama Baha'i	Tenggarong	• Jumlah pengikut ± 70-80 orang • Terjadi tuntutan pengikut untuk pencantuman indentitas keagamaan dalam administrasi kependudukan dan sekolah.

Bidang	Isu Strategis	Lokasi	Keterangan
	2. Keberadaan Organisasi Islam Garis Keras "Khilafatul Muslimin"	nab, Tenggarong	Jumlah pengikut ± 20-50 orang
	3. Keberadaan Faham Aliran Syiah	Tenggarong	• Jumlah pengikut ± 40-100 orang • Telah membentuk Yayasan untuk kegiatan sosial dengan nama yayasan "GHIPARI" • Pada Tahun 2016, penganut faham Syiah telah membentuk Ormas yang bernama Pada Ahlulbait Indonesia (ABI) Kutai Kartanegara. • Untuk diketahui bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) Ahlulbait Indonesia (ABI) Kutai Kartanegara sudah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dengan SKT No. 00-23-01-0005/II/2016 dengan Ketua Bintoro Wibono dan Sekretaris Ahmad Fauzi.
Politik	Suksesi Pimpinan dan pengurus Partai Politik di Kabupaten Kutai Kartanegara, yangmana banyak kepentingan agenda politik Daerah maupun agenda	Kabupaten Kutai Kartanegara	• Adanya upaya mengusai pucuk pimpinan Partai Politik di Daerah dalam rangka mengamankan agenda politik pada pemilihan Bupati dan Gubernur. • Membangun kekuatan untuk menghadapi Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2024.

Bidang	Isu Strategis	Lokasi	Keterangan
	kepemimpinan Nasional menghadapi Pemilu 2024		
Ekonomi	1. Potensi Gangguan Keamanan akibat banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang Tambang Batubara yang tidak beroperasi.	Kecamatan Lokasi Perusahaan Batubara	• Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) • Banyaknya Perusahaan yang belum menyelesaikan hak-hak karyawan yang telah di PHK
	2. Banyaknya terjadi peselisihan antara warga masyarakat dengan perusahaan terkait lahan/SDA	• Kecamatan Lokasi Perusahaan Batubara dan perkebunan Kelapa Sawit	
	3. Gesekan antar warga dengan perusahaan pemanfatan koridor batubara (eks Tambang)	• Kecamatan Lokasi Perusahaan BatubaraKoridor	• Penggunaan jalan umum untuk kegiatan houling menuju stock file yang meresahkan masyarakat karena jalan umum menjadi rusak • Meningkatnya kejadian banjir dikala hujan
Sosial Budaya	Ormas berlatar belakang Kedaerahan	18 Kecamatan	• Kehadiran Ormas kedaerahan yang meresahkan masyarakat karena sering menimbulkan konflik • Ormas kedaerahan yang banyak dimanfaatkan oleh perusahaan/pengusaha untuk mengintimidasi pihak lain • Ormas kedaerahan yang menjadi preman bagi perusahaan

Bidang	Isu Strategis	Lokasi	Keterangan
Hankam	Penyebaran faham radikal dan terorisme	Kecamatan di daerah Pesisir	• Persembunyian pelaku BOM Bali I di Tanjung Berukang Anggana Tahun 2002 • Penangkapan Teroris di Loa Janan Kab. Kukar Tahun 2011 • Simpatisan kelompok radikal kanan
		Tenggarong, Loa Duri dan Loa Janan	• Pada Tahun 2018 terdapat 2 (dua) narapidana teroris yang akan berakhir masa pidananya dan akan kembali kepada masyarakat, sehingga perlun pengawasan dari pihak terkait. • Adanya kemungkinan sel-sel pengikut Jamaah Asharut Daulah yang terus hidup dan berkembang di Kutai Kartanegara

b. Realisasi Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Meningkatnya intensitas konflik sosial bersifat horizontal dan vertikal beberapa Tahun terakhir, memposisikan penyelenggaraan pemerintahan dalam situasi sulit. Kelemahan pemerintah dalam menangani kasus konflik sosial menjadi celah institusi sosial yang diperankan tokoh-tokoh radikal menggantikan fungsi dan peran pemerintah, akibatnya konflik sosial semakin merata penyebarannya.

Beberapa permasalahan yang bisa memicu terjadinya konflik di Kabupaten Kutai Kartanegara selama ini baik konflik yang berlatar belakang Sumber Daya Alam, Lahan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hubungan Industrial Ketenaga kerjaan, batas wilayah maupun konflik antar Etnis dan Agama (SARA).

Berikut Data penanganan Konflik Sosial yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang Tahun 2023 :

NO.	KEJADIAN KONFLIK	JUMLAH	LANGKAH PENANGANAN
1	Keberadaan Kelompok Khilafatul Muslimin Kelompok Khilafatul Muslimin di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong membangun pondok pesantren dengan nama Pondok Pesantren Al – Ukhuwah Islamiyah, dimana Ponpes ini tidak memiliki izin operasional dari Kementerian Agama Kab. Kutai Kartanegara, hal ini yang menjadikan alasan bagi warga untuk menolak keberadaan Ponpes ini, dimana Ponpes ini merupakan lembaga pendidikan sayap dari Kelompok Khilafatul Muslimin yang mengusung sistem Kekhaliifahan dan tidak mengakui pemerintah.	1	1. Melakukan koordinasi dengan kelurahan Jahab untuk melakukan pendataan 2. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual. 3. Mendorong Kantor Kemenag Kukar mela kukan pembinaan dan proses legalitas perizinan Pondok Pesantren. 4. Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini pada 6-2-2022 5. Rapat Penangan Konflik Sosial pada 14-2-2023 yang dipimpin Asisten I 6. Rapat Penangan Konflik Sosial pada 17-2-2023 di Ruang Sekda
2	Konflik Lahan ahli waris A.P. Sosro Negoro dengan PT. MHU aksi penutupan jalan houling PT. Multi Harapan Utama oleh ahli waris A.P. Sosro Negoro, meminta konpensasi atas lahan yang digunakan oleh PT. MHU dengan klaim lahan seluas 1,300 meter.(09/01/2023) Permasalahan yang sudah berjalan selama 9 Tahun ini, sejatinya sudah mendapat angin segar dari pihak-pihak terkait salah satunya dari Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kementerian ini pada Tahun 2019 yang mengintruksikan pihak perusahan bersama ahli waris dapat bekerja sama. Namun hingga saat ini pihak ahli waris justru tidak mendapatkan apa-apa.	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi konflik jalan aksi penutupan jalan houling. 2. mendorong dilakukannya negoisasi untuk membuka jalan agar perusahaan kembali bisa beroprasi. 3. melakukan koordinasi untuk meneruskan tuntutan kepada pihak terkait 4. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.

	Dari data terdahulu sejatinya kepemilikan lahan seluas 105.000 hektar yang diakui oleh para ahli waris pada Tahun 1899 dan ditulis langsung oleh Adji Muhammad Sultan Sulaiman. Hal ini juga diakui oleh Mentri Dalam Negeri Pada Tanggal 30 Juni 1977.		
3	Penghentian Kegiatan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB) di STS Muara Berau oleh Himpunan Nelayan seluruh Indonesia (HNSI) Muara Badak Kelompok nelayan meminta PT PTB akan menghentikan kegiatan karena PT. PTB tidak memiliki Dokumen perijinan amdal floating crane PT. PTB. Nelayan menuntut PT. PTB dan memberikan ganti rugi dan CSR kepada nelayan	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi konflik jalan aksi penghentian operasional PT. PTB. 2. mendorong dilakukannya negoisasi antara kelompok nelayan dan PT. PTB. 3. melakukan koordinasi untuk meneruskan tuntutan kepada pihak terkait 4. meminta pihak kecamatan untuk melakukan mediasi kedua belah pihak (19-1-2023) 5.Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.
4.	Penanganan Konflik warga Muara Badak Ulu dengan PT. Sawit Unggul Agro Niaga (SUAN) terkait dugaan adanya pencemaran lingkungan milik warga Tanggal 13 Februari 2023 Pukul 11.00 pertemuan/Mediasi di Kantor PT.SUAN Camat Muara Badak Arpan S,Sos, Kasi trantib Kantor Camat (Nursidik SH), Dan Ramil Muara Badak (Kapten Rukito), Mewakili Kapolsek (Bpk Iptu Lamser L), Aipda Kukuh DK (Kanit Intelkam Polsek Muara Badak) BLHD Kabupaten Kukar (Pramu Wisnu), Kepala Desa Muara Badak(Ruslan E.). Selajutnya di adakan pertemuan/Mediasi di Kantor PT.SUAN Setelah Itu Kelapangan bersama sama Tim dari DLHD Bersama Muspika Dinas Perkebunan	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi konflik 2. mendorong dilakukannya mediasi antara kelompok warga dan PT. SUAN. 3. meminta Dinas Lingkungan Hidup Daerah, untuk melakukan pengecakan lapangan, mengenai titik koordinat lokasi dugan pencemaran

	Kabupaten Kukar untuk menentukan ada pencemaran atau tidak sampai pengambilan Titik Koordinat Tanah yang dianggap kena pencemaran		
5	Konflik Penolakan Tambang Ilegal di loa Kulu (Desa Rempanga) yang sempai terjadi pertikaian antar warga dan Preman tambang batubara ilegal Daniel Mahendra Yuniar, 41 Tahun, berdiskusi bersama 18 warga. Pertemuan di antara rintik hujan itu menghasilkan keputusan penting. Mereka akan memblokade jalur truk angkutan batu bara (hauling). Malam itu juga. Daniel dan warga sudah jemu dengan dampak hauling bagi permukiman. 1 April 2023, sekitar pukul 01.00 Wita, jalur angkut batu bara di Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara, akhirnya ditutup. Warga memarkir sebuah mobil putih bernomor polisi KT 1077 CZ di tengah jalan. Akses menuju tempat penumpukan (stock pile) dan pemuatan (loading) batu bara di tepi Sungai Mahakam terkunci. Belasan dump truck bermuatan batu bara yang diduga diangkut dari tambang ilegal akhirnya tak bergerak. Tiba-tiba, seorang pria gempal yang mengenakan kaus hitam berteriak. Ia memukul kendaraan yang tadi digunakan untuk menutup jalan. Tak lama kemudian, pria tersebut mengeluarkan sebilah pisau dan berusaha menikam seseorang yang tak jauh	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk melakukan pengamanan dan melokalisi tempat perkara untuk mengantisipasi konflik berlanjut. 2. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.

	darinya. beruntung warga cepat melarikan diri		
6	Aksi protes warga RT. 16 Desa Prangat Selatan dan RT 16 Sambera Baru kepada pihak PHSS terkait Kegiatan project pemasangan pipa flow Line. Warga protes PHSS terkait Kegiatan project pemasangan pipa flow Line tipe 6" yang dikerjakan oleh PT. PTM (Kontraktor PHSS). Dimana jaringan pipa menghalangi akses menuju mushola. Selasa tanggal 9 Mei 2023, pukul 09.00 Wita menghentikan prekerjaan pemasangan pipa tersebut.	1	melakukan koordinasi dan meminta kepada pemerintah kecamatan, desa dibantu Babinnsa dan Babhinkamtibmas untuk mengamankan keadaan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Serta agar warga pihak perusahaan untuk duduk bersama dalam mencari solusi yang terbaik.
7.	Sengketa Lahan di Wilayah Kilo Meter 27 Antara Sdr Lasade Cs dengan Sdr Gazali Cs. Masing-masing pihak mengklaim lahan garapan dengan lokasi terletak di Wilayah Kilo Meter 27 Blok D dan Blok E. Informasi adanya sengketa lahan diperoleh dari pihak kecamatan, sehingga Pemerintah Kabupaten meminta agar Pemeritah Kecamatan bersama pihak keamanan untuk memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak untuk menghindari konflik sosial. sehingga Pada Senin, 29 Mei 2023 bertempat di Polsek Marangkayu dilaksanakan fasilitasi penanganan Sengketa Lahan di Wilayah Kilo Meter 27 Antara Sdr Lasade Cs dengan Sdr Gazali Cs. yang dihadiri camat	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi terjadinya konflik antar warga. 2. mendorong kepada kepala desa dan lembaga-lembaga desa serta pihak kecamatan untuk terus melakukan pendekatan dan mendorong dilakukan mediasi, tidak melakukan penguasaan atau tindakan yang bisa memacing terjadinya konflik. 3. melakukan koordinasi kepada pihak terkait 4. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.

	Marangkayu, Kapolsek marangkayu, Danposramil marangkayu, Kasi Pemerintahan Kecamatan marangkayu dan kedua belah pihak yang bersengketa, dengan kesepakatan : 1. Masing-masing pihak sepakat belum mengetahui tapal batas lahan yang digarap yang menjadi obyek permasalahan . 2. Disepakati akan dilakukan pengukuran tapal batas lahan garapan oleh masing² pihak yang terletak di Blok D dan Blok E yang menjadi obyek permasalahan . 3. Disepakati akan dilakukan pengukuran lahan yang menjadi obyek permasalahan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Marangkayu dan Pemerintah Desa Santan Ulu.		
8	Penolakan Pembangunan Gereja HKBP di Desa Loa Duri Ilir Terjadi penolakan warga RT.11 dan RT.26 desa Loa Kulu Ilir Kecamatan Loa Janan atas pembangunan Gereja HKBP (saat ini dalam proses pembangunan), dimana warga menganggap pembangunan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi terjadinya konflik antar warga. 2. mendorong kepada kepala desa dan lembaga-lembaga desa untuk melakukan mediasi. 3. melakukan koordinasi kepada pihak terkait 4. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.
9	Aliansi Masyarakat di Samboja Lakukan Aksi Penutupan Akses Jalan Pertambangan Aliansi Masyarakat Bersatu di Kecamatan Samboja Barat unjuk rasa kepada perusahaan Lembuswana Perkasa (LP) dan PT. Ryan Eka Pratama (PT. REP). untuk melakukan progres penutupan lubang bekas	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi terjadinya konflik antar warga dengan pekerja. 2. melakukan koordinasi kepada pihak terkait seperti Dinas Pertambangan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. 3. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.

	tambang dan sengketa lahan yang belum tuntas dengan permintaan masyarakat. Sebelumnya, telah dilakukan mediasi pertemuan antara masyarakat terdampak dengan pihak perusahaan untuk menemukan win win solution, dan dituangkanlah dalam bentuk berita acara. Namun, dari berita acara tersebut pihak perusahaan belum juga melakukan progres komitmen yang telah disepakati bersama. Ketua Aliansi Peduli Lingkungan Hidup Bukit Merdeka (APLH-BM) Yasir Den Has mengatakan aksi yang terjadi pada Senin (12 Juni 2023) merupakan bagian dari upaya masyarakat dalam merealisasikan penutupan bekas lubang tambang yang berdekatan dengan permukiman masyarakat, tepatnya berada di Kelurahan Bukit Merdeka.		
10	Tuntutan Pemerintah Desa di Kecamatan Tabang terhadap PT. Bayan Group Pemerintah Desa di Kecamatan Tabang, menuntut agar PT. Bayan Group dapat memberikan CSR secara merata diseluruh desa di kecamatan Tabang, tidak hanya di desa Gunung Sari, desa-desa yang lain memerlukan Solar Cell untuk penerangan jalan, banyak jalan-jalan desa dan gedung sekolah yang rusak. Sehingga para pemerintahan desa menyampaikan tuntutan agar PT. Bayan Group dapat memberikan CSR secara merata diseluruh desa di kecamatan Tabang.	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi konflik antar warga dengan perusahaan, yang mengakibatkan terganggunya operasional perusahaan. 2. mendorong DPRD untuk dapat menjembatani pertemuan antara Perusahaan dengan Pemerintahan Desa agar beberapa keinginan bisa diakomodir oleh perusahaan. 3. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.

11	Lahan Warga L3 belum digantirugi oleh PT. Jembayan Muara Bara (JMB) Warga L3 menuntut kepada Jembayan Muara Bara (JMB) untuk segera melakukan gantirugi lahan-lahan warga desa Mulawarman Dusun Karya Harapan, karena itu warga meminta advokasi kepada Forum Pemuda Peduli Pembangunan Kalimantan Timur untuk menyampaikan keluh kesah dan tuntutan mereka. MenurutForum Pemuda Peduli Pembangunan Kalimantan Timur bahwa PT Jembayan Muara Bara atas pemasalahan penyerobotan lahannya yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Seperti yang diketahui bahwa penyerobotan lahan merupakan perbuatan mengambil hak atau harta orang lain tanpa mengindahkan konsekuensi hukum dan aturan yang berlaku. Dalan UU No. 3 Tahun 2020 perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 35 dan Pasal 36 telah mengatur bahwa pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatannya wajib mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah atau telah menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi konflik antar warga dengan perusahaan. 2. melakukan koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti tuntutan warga L3 desa Mulawarman. 3. mendorong kepada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur untuk membuat surat teguran kepada PT JMB terkait kegiatan PT JMB di lahan masyarakat Desa Mulawarman. 4. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.

12	Konflik Kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura Beredarnya Surat Keputusan (SK) Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura XXI Nomor : 001/SK-1/SKKM/X/2023.dikeluarkan 1 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura XXI, Adji Mohammad Arifin tersebut menetapkan pencabutan gelar bangsawan kesultanan, gelar Pangeran Hario Kesumo Poeger dari Adji Azuar Poeger, dan gelar Pangeran Hario Kesuma Poeger dikembalikan ke keraton. Adji Azuar Poeger mengatakan bahwa dirinya yang diamanahkan oleh Sultan Almarhum Salehuddin II yang memberikan gelar kepada dirinya menggantikan gelar orang tuanya almarhum Adji Pangeran Hario Kesumo Poeger. Konflik bermula dengan adanya surat pernyataan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan sultan Adji Mohammad Arifin selaku Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura XXI oleh kerabat keturunan Aji Pangeran Hario Kesumo Poeger bin Adi Mohammad Parikesit.	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi konflik antar pendukung kerabat kerajaan. 2. membuat telaahan staf yang disampaikan kepada Bupati Kutai Kartanegara, agar Bupati Kutai Kartanegara bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) mengambil langkah-langkah untuk mendamaikan kedua belah pihak, agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan untuk menjaga kondusifitas daerah dan kehidupan sosial budaya di Kutai Kartanegara. 3. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.
13	Konflik Pembebasan Lahan Warga Desa Teluk Bingkai oleh PT. ABK Lahan Warga Desa Teluk Bingkai belum diselesaikan PT. Agro Bumi Kaltim (ABK) sehingga warga menghentikan truk-truk pengangkut hasil sawit. Warga menuntut kejelasan ganti rugi lahan yang digarap oleh PT.ABK, warga meminta mediasi dengan PT.ABK dan PT. Evans Indonesia untuk	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi konflik antar pendukung 2. mengkoordinasikan kepada Dinas Perkebunan untuk dapat menindaklajuti permasalahan dengan mempertemukan perusahaan dengan warga. 3. Meminta kepada Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kecamatan untuk melalukan pendekatan kepada masyarakat untuk mengumpulkan data bukti pendukung kempemilikan lahan, dan meminta masyarakat tidak berbuat anarkis dan melanggar hukum

	menyelesaikan tuntutan warga.		4. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.
14	Klaim Lahan dilokasi SMP YPK Tenggarong Lahan SMP YPK Tenggarong yang terletak di Jalan Mawar Kelurahan Panji Tenggarong diklaim oleh Ahli Waris Alm. Abd. Majid M, Gufran Majid menuntut kepada pihak Yayasan SMP 1 YPK agar mengosongkan lahan yang di klaim sebagai milik ahli Waris dari bapak Alm. Abd. Majid M, Gufran Majid Perkara yang dimenangkan Ahli Waris berdasarkan surat putusan Makhkamah Agung RI putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3278/PDT/1996 tanggal 27 Juni 2000 Jo Putusan Pengadilan Tinggu Kalimantan Timur tanggal 1 Mei 1996. sangat mutlak hak sepenuhnya Ahli Waris. berdasarkan putusan tersebut, dengan ukuran 50m x 133m = 6,650 M2 Ahli waris menunut pembayaran gantirugi lahan kepada pembuat sertifiat diatas lahan tersebut yakni SMP YPK dan 20 nama pemilik sertifikat diatas lahan milik ahliwaris. hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi konflik antar wraga dan ahliwaris 2. mengkoordinasikan kepada pihak terkait dengan proses mediasi. 3. Meminta satpol PP dapat mengawasi semua pergerakan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. 4. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.

Rekapitulasi Data

Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	Penanganan Konflik Sosial	Bulan												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Pemantauan Orang Asing / Tenaga Kerja Asing (Rakor dan Monitoring/Sidak)						2							2
2	Penanangan Tindak Kriminal pemicu Konflik SARA	1											1	2
3	Penanganan Prostitusi dan penyakit masyarakat													0
4	Penanganan Kepegawaian ASN/THL/Staf Desa/Kel Kab. Kutai Kartanegara													0
5	Penanganan Konflik Antar Umat Beragama						4							4
6	Penanganan (Mediasi) Konflik Hubungan Industrial			2										0
7	Mediasi tuntutan masyarakat atas pelayanan Publik (PLN/PDAM dll)													0
8	Penanganan Konflik Masyarakat dengan Perusahaan													-
	- Melibatkan Ormas/LSM													-
	- Hanya Kelompok Masyarakat			2		1	1				2			6
9	Penanganan Konflik Peningkatan Suhu Politik							1						1
10	Deradikalisme Penanggulangan Paham Radikal													
11	Penanganan Jaringan Teroris dan organisasi radikal			1					1					2
12	penanganan konflik lahan (SDA) atas klaim antar kelompok masyarakat	1	1	3										5
13	Pemantauan dan Penggalangan Napiter													0
14	Penanganan Konflik Pemerintah dengan perusahaan / pengusaha													0
15	Penanganan yang mengarah pada konflik SARA	1			1									2
16	Rakor Tim Pakem Kukar												1	1
17	Rakor Penanganan Konflik													
	- Politik													0
	- Lahan SDA / Pertambangan													0
	- Kewaspadaan													0
	- Sosial Budaya			1	2									3
	- Ketenaga Kerjaan													0
Jumlah Penanganan Konflik Sosial		6	6	7	4	1	6	1	2	0	2	0	2	31

Rekapitulasi Data Penanganan Aspirasi Politik
di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	Penanganan Aspirasi Politik	Bulan (kali)												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Konflik Pilkades									1				1
2	Sengketa Partai Politik dan Pemilu	1					1		1					3
Jumlah Penanganan Aspirasi Politik		1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	4

Sasaran Strategis III : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis III sebagaimana diatas, diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Persentase Aparatur dan Masyarakat yang Memiliki Pemahaman Wasbang dan Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Ketahanan Ekososbud, Gambaran pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis III

Indikator Sasaran	Target	Realisasi		
		2021	2022	2023
Persentase Aparatur dan Masyarakat yang Memiliki Pemahaman Wasbang	1,78%	1,41%	1,64%	2,19%
Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Ketahanan Ekososbud	1,21%	0,96%	1,25%	1,77%

Dari 2 (dua) indikator tersebut diatas, semuanya melebihi dari target yang telah ditetapkan dan meningkat dari Tahun sebelumnya, berikut analisis dari kedua indikator tersebut :

a. Indikator I : Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa mengenai diri dan ideologinya, serta cita-citanya yang diorientasikan untuk memperkokoh dan menjaga persatuan dan ketahanan bangsa dengan tujuan dan sasaran wawasan kebangsaan sebagai berikut :

1. Bangsa yang kuat, rukun bersatu, berdaya saing tinggi dan sejahtera
2. Terjaganya sejarah kebangsaan indonesia dan cinta NKRI
3. Revitalisasi dan reaktualiasi nilai nilai pancasila
4. Secara khusus meredam berkembangnya penonjolan primordalisme sempit, kesukuan, kedaerahan dan mencegah disintegrasi bangsa
5. Meningkatkan kualitas penangkal dunia maya demi lestarinya bangsa.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa salah satu tugas Badan Kesbangpol adalah pembentukan karakter kebangsaan kepada aparatur dan masyarakat demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa termasuk didalamnya pencegahan konflik di masyarakat dan golongan. Untuk itu pada indikator ini Badan Kesbangpol telah melakukan berbagai upaya penyuluhan dan sosialisasi masalah wasbang dengan kelompok sasaran Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Pelajar dan Mahasiswa dengan harapan mereka bisa memahami dan melaksanakan terkait dengan wawasan kebangsaan

Dalam hal ini Badan Kesbangpol telah melaksanakan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator tersebut dengan kegiatan yang dilakukan di 20 kecamatan yaitu Pembinaan Pembauran Masyarakat, Pembinaan Bela Negara dan Karakter Kebangsaan, serta sosialisasi FPK dan KPU kabupaten kutai kartanegara menuju pemilu damai dan demokratis. Dalam hal pencapaian pada indikator ini yang merupakan hal mendasar adalah pada tingkat kehadiran dan pemahaman peserta pada kegiatan pembinaan dan penyuluhan.

Indikator II : Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Ketahanan Ekososbud

Perkembangan teknologi informatika saat ini telah menampilkan dua sisi yang berbeda disaat bersamaan, kemajuan teknologi telah membuat kehidupan semakin mudah dan canggih, disisi lain juga berdampak buruk bagi kehidupan generasi muda saat ini. Krisis ekonomi sebagai dampak globalisasi yang terjadi telah menjajah

kalangan menengah kebawah yang tersisih dari pergeseran zaman, hal tersebut banyak merubah tatanan kehidupan sosial dan budaya dalam masyarakat, sehingga menjadi ancaman serius terhadap etika dan moral bangsa, semua tercermin dari meningkatnya tindakan penyakit masyarakat

Melihat pokok permasalahan diatas Badan Kesbangpol berupaya untuk menekan jumlah kasus penyakit masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dari seluruh upaya yang telah dilakukan secara maksimal ditargetkan pada Tahun 2020 jumlah kasus bisa turun hingga 205 kasus karena dari Tahun 2012 jumlah 186 kasus terus menurun hingga pada 2013 menjadi 161, namun pada Tahun 2014 ternyata makin meningkat hingga 170 kasus dan Tahun 2015 makin meningkat menjadi 224 kasus selanjutnya pada Tahun 2016 meningkat lebih ekstrim menjadi 713 kasus dan pada Tahun 2017 telah menurun menjadi 469 kasus kemudian pada Tahun 2018 menurun lagi menjadi 359 kasus dan pada Tahun 2019 menurun sedikit menjadi 318 kasus, namun belum sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian indikator ini gagal tercapai dari target 205 kasus pada 2019, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan ditemukan bahwa peningkatan kasus yang sangat tinggi ini merupakan kegagalan pencapaian dalam hal penurunan jumlah kasus penyakit masyarakat, namun jika dilihat lebih rinci bahwa kasus yang paling tinggi adalah narkoba, hal ini juga disebabkan oleh adanya operasi dari pihak kepolisian dengan sandi “Operasi Bersinar” sehingga pada Tahun 2018 dan 2019 seluruh kejahatan narkoba dapat dibongkar, dengan harapan pada Tahun berikutnya jumlah kasus ini akan berkurang. Untuk kasus lain terjadi penurunan dari Tahun sebelumnya sehingga kegagalan pencapaian ini merupakan bahan evaluasi agar pada Tahun berikutnya bisa ditekan lagi dengan peningkatan penyuluhan serta kerjasama dengan pihak terkait, namun yang akan menjadi fokus dari Badan Kesbangpol adalah kasus Narkoba yang masih tinggi, dengan lebih meningkatkan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan bentuk pencegahan lainnya kegiatan yang dilaksanakan masih belum menyentuh kepada sasaran yang ingin diberikan penyuluhan, disamping anggaran yang minim juga karena kebanyakan pelaku

kasus tersebut adalah para pemuda dan walaupun telah dirangkul namun karena terputusnya program pembinaan dan kurang luasnya cakupan peserta di tiap kecamatan dan desa/kelurahan, walaupun tiap kegiatan sudah dilaksanakan, dalam kasus ini perlu pendalaman lagi setelah pelaksanaan penyuluhan agar hasil yang didapat lebih baik dengan turunnya angka kriminalitas. Kasus yang sangat tinggi terdapat pada Narkoba, inilah yang menjadi faktor utama dalam pemberantasan kasus penyakit masyarakat dan sesuai permendagri nomor 21 Tahun 2013 Badan Kesbangol menjadi fasilitator dalam pencegahan peredaran narkoba. Berbagai upaya telah dilakukan Badan Kesbangpol sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialiasi/penyuluhan kepada para pelajar khususnya dan kalangan masyarakat pada umumnya tentang bahaya narkoba dengan berkerjasama dengan BNK dan Dinas Kesehatan sebagai narasumber. Dan setelah penyuluhan dilaksanakan Tes Urin kepada para peserta dan hasil yang didapat semuanya menunjukan negative dalam pemakaian narkoba.
2. Pelaksanaan Tes Urin bagi para aparatur Badan Kesbangpol dalam 2 Tahun berturut-turut, dengan harapan para aparatur bisa terbebas dari narkoba.
3. Menghimbau kepada seluruh OPD untuk dapat melaksanakan Tes Urin bebas narkoba.

Berikut disampaikan data pantauan kasus penyakit masyarakat di Kutai Kartanegara :

Pantauan Kasus Penyakit Masyarakat Tahun 2021 – 2023

No.	Jenis Kriminal	2021	2022	2023
1	Narkoba	224	178	239
2	Pembunuhan	3	3	-
3	Kejahatan Seksual	1	3	2
4	Penganiayaan	22	32	15
5	Pencurian	17	36	16
6	Eksploitasi Anak Bawah Umur	24	25	15
7	Premanisme	0	5	6
	JUMLAH	291	282	293

Dari data diatas jumlah kasus yang terjadi pada Tahun 2023 sebanyak 293 kasus, telah terjadi peningkatan sebanyak 11 kasus dari Tahun 2022 dengan target jumlah kasus sebanyak 282 kasus, penurunan kasus ini merupakan suatu capaian yang cukup baik, untuk kasus lain terjadi penurunan dari Tahun sebelumnya sehingga kegagalan pencapaian ini merupakan bahan evaluasi agar pada Tahun berikutnya bisa ditekan lagi dengan peningkatan penyuluhan serta kerjasama dengan pihak terkait, namun yang akan menjadi fokus dari Badan Kesbangpol adalah kasus Narkoba yang masih tinggi, dengan lebih meningkatkan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan bentuk pencegahan lainnya.

Selain penyakit masyarakat, dalam hal ini juga dilaksanakan kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama dan fasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi FKUB se – Kaltim serta sosialisasi FKUB dan BAWASLU kabupaten kutai kartanegara menuju pemilu damai dan demokratis

Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis IV sebagaimana diatas, diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah dan Persentase Ormas Yang Tertib Administrasi, Gambaran pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis IV

Indikator Sasaran	Target	Realisasi		
		2021	2022	2023
Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	11,62%	11,04%	11,90%	14,76%
Persentase Ormas Yang Tertib Administrasi	9,9%	7,9%	8,8%	9,8%

Dari 2 (dua) indikator tersebut diatas, pada indikator persentase ormas yang tertib administrasi yang belum mencapai target, karena tidak tercapainya ormas yang difasilitasi pada Tahun 2023, sementara 1 (satu) indikator telah mencapai target yang ditetapkan bahkan melebihi, sehingga secara keseluruhan pencapaian kinerja pada sasaran strategis ini telah berhasil, berikut analisis dari dua indikator tersebut :

a. Indikator I : Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah

Dengan melihat data Partisipasi Pemilih dalam menggunakan Hak pilihnya dalam Pemilu periode 2015 – 2020 yang tertinggi terdapat pada Pemilihan Legislatif dan Presiden Serentak Tahun 2019 sebesar 81,24 % karena banyak kepentingan politik pada proses pemilihan ini, sedangkan pada pemilu lain cenderung menurun dan secara keseluruhan tidak ada yang mencapai target yang ditetapkan yaitu 70 % dimana menurunnya Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau dengan kata lain jumlah golput (Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih) semakin meningkat. Maka Badan Kesbangpol harus mengkaji untuk mencari kantong-kantong daerah yang pontensi Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih tinggi. Selain itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya angka partisipasi pemilih :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi (apatis)
2. Kurangnya sosialisasi tentang Pemilu ke pelosok kecamatan dan desa/kelurahan
3. Metode sosialisasi yang belum atraktif dan belum menyetuh kepada para pemilih potensial (pemilih pemula)
4. Kekecewaan masyarakat terhadap produk hasil pemilu sebelumnya

Inilah faktor penyebab masih terdapat rendahnya angka partisipasi pemilih sebagai penunjang keberhasilan berdemokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Badan Kesbangpol telah berupaya maksimal dan akan dijadikan bahan evaluasi untuk Pemilu berikutnya. Dengan beberapa kegiatan yang telah dilakukan Badan Kesbangpol telah berhasil mencapai target yang ditetapkan, namun secara keseluruhan tingkat partisipasi ini masih baik karena masih diatas 50% yang berarti capaian ini harus ditingkatkan lagi.

Untuk lebih jelas, berikut ini disajikan data dan grafik Partisipasi Pemilih dalam menggunakan Hak pilihnya dalam Pemilu sebagai berikut :

Data Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu dan Pemilukada Tahun 2015-2020

INDIKATOR	2015	2016	2018	2019	2020
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	Pilbup : 58,93%	Pilkades : 70,06%	Pilgub : 60,44	Pileg/Pilpre 81,24	Pilbup 57,00

GRAFIK PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

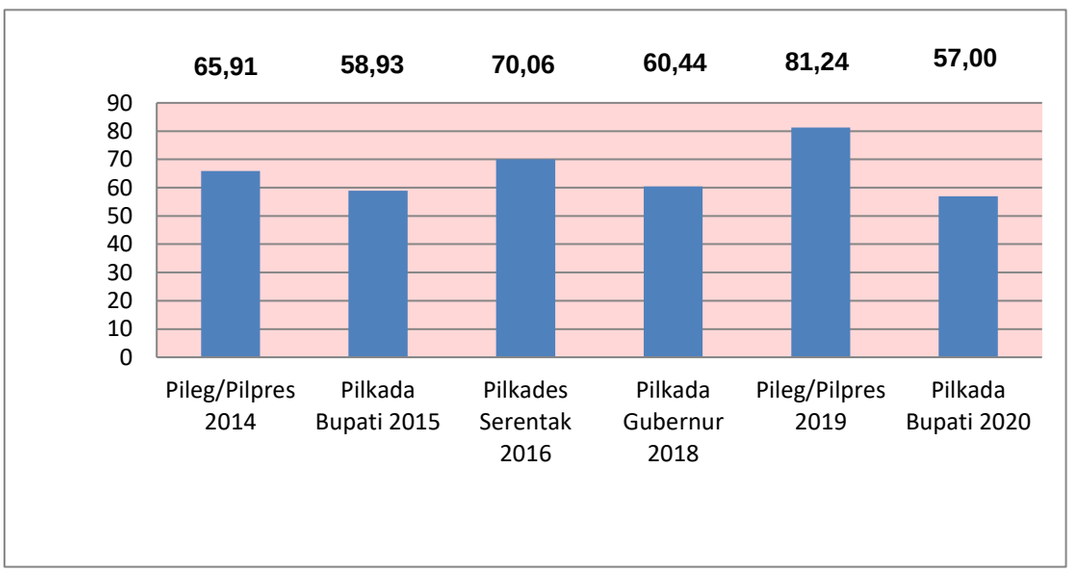

Terkait dengan parpol pada fasilitasi bantuan keuangan partai politik untuk Tahun 2023, seluruh parpol telah diverifikasi dan melengkapi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dan persyaratan verifikasi. Pada Tahun 2019 proses bantuan keuangan bagi Partai

Politik dilaksanakan bagi parpol hasil Pemilu Legislatif periode Tahun 2019-2024 terdapat 10 (sepuluh) Parpol.

Secara keseluruhan untuk parpol berdasarkan hasil evaluasi dilihat bahwa masih ada bendahara parpol yang tidak cermat dalam pertanggungjawaban dana bantuan yang dikelola, hal ini dapat dilihat dari adanya temuan BPK terkait laporan pertanggungjawaban masing-masing parpol, selain itu Badan Kesbangpol akan terus memberikan penyuluhan dan pendampingan terhadap parpol tentang mekanisme dan persyaratan administrasi kegiatan agar bisa tertib.

DATA PARTAI POLITIK PENERIMA BANTUAN KEUANGAN
PERIODE 2019-2024

NILAI PER SUARA = RP. 3.800,-

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA PEMILU 2019	NILAI BANTUAN	KETERANGAN
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5 Kursi	34.286 Suara	130.286.800	Lengkap
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	7 Kursi	46.667 Suara	177.334.600	Lengkap
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	7 Kursi	45.361 Suara	172.371.800	Lengkap
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	13 Kursi	95.345 Suara	362.311.000	Lengkap
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	2 Kursi	20.373 Suara	77.417.400	Lengkap
6.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3 Kursi	23.250 Suara	88.350.000	Lengkap
7.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1 Kursi	14.340 Suara	54.492.000	Lengkap
8.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1 Kursi	16.764 Suara	63.703.200	Lengkap
9.	PARTAI AMANAT NASIONAL	5 Kursi	34.071 Suara	129.469.800	Lengkap
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1 Kursi	12.410 Suara	47.158.000	Lengkap
JUMLAH		45 Kursi	342.867 Suara	1.302.894.600	

Dari 16 Partai Politik pada 2019 menjadi 10 partai politik sesuai hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019, ada 10 Partai Politik yang telah melengkapi persyaratan sebagai penerima bantuan keuangan Tahun 2023.

Dari data diatas menunjukkan bahwa pada indikator ini telah ditetapkan target 100% dan telah tercapai 100%, meskipun telah lengkap hal ini perlu terus diawasi lagi dalam penggunaan agar tidak terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan kegiatan dan anggaran

yang didapat oleh Parpol. Agar parpol dan ormas bisa tertib dalam administrasi, maka Badan Kesbangpol akan melaksanakan Bimtek bagi Bendahara Parpol dan Ormas pada Tahun berikutnya.

b. Indikator II : Persenstase Ormas Yang Tertib Administrasi

Dalam indikator yang kedua ini, digambarkan Prosentase Ormas Yang Tertib Administrasi, pada indikator ini telah ditetapkan target 9,9% dengan realisasi 9,8%, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, maka persyaratan pendaftaran ormas telah diperketat sehingga hanya ormas yang sudah memiliki cabang induk di Kabupaten yang bisa mendaftarkan ormasnya dan pada Tahun ini ormas yang mendaftar sama dengan Tahun 2022 sebanyak 17 ormas dan 21 ormas pada Tahun 2023, meskipun demikian, ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan sebanyak 30 ormas, selain itu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 82/PUU-XI/2013 tanggal 22 Oktober 2014 disebutkan bahwa ormas diperbolehkan untuk tidak terdaftar, yang membuat ormas yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak melakukan pendaftaran ormasnya dan Bdan Kesbangpol memiliki tugas untuk tetap memonitoring dan mengawasi keberadaan ormas yang belum terdaftar di setiap terdaapt kegiatan dari ormas tersebut, ini menunjukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang berorganiasi mengalami peningkatan. Sehingga bisa tertib dalam administrasi. Dan mulai pada Tahun 2018 pendaftaran ormas telah melalui Kemendagri melalui Ditjen Polpum.

Data Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar

Tahun 2018 – 2023

NO	ORMAS	TAHUN (JUMLAH)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	ORMAS	3	4	12	10	8	14
2.	OKP	-	-	-	-	4	
3.	LSM	-	2	-	2	-	-
4.	PAGUYUBAN	2	3	-	-	-	-
5.	AGAMA	-	1	2	1	3	-
6.	PROFESI	2	-	-	-	-	1
7.	LEMBAGA ADAT	1	-	-	-	-	1
8.	YAYASAN	-	2	2	4	2	5
	JUMLAH	8	12	16	17	17	21

Data Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar Tahun 2023

(berdasarkan sebaran di kecamatan)

No	Kecamatan	Ormas	OKP	LSM	Paguyuban	Lemb. Adat	Profesi	Yayasan	Jumlah
1	Marangkayu	-	-	-	-	-	-	-	0
2	Muara badak	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Samboja	2	-	-	-	-	-	-	0
4	Muara Jawa	-	-	-	-	-	-	-	0
5	Sanga-sanga	1	-	-	-	-	-	-	0
6	Anggana	-	-	-	-	-	-	-	0
7	Loa Janan	-	-	-	-	-	-	-	0
8	Loa Kulu	-	-	-	-	-	-		0
9	Tenggarong Seberang	-	-	-	-	-	1	-	0
10	Tenggarong	11	-	-	-	1	-	4	21
11	Sebulu	-	-	-	-	-	-	-	0
12	Muara Kaman	-	-	-	-	-	-	1	0
13	Kota bangun	-	-	-	-	-	-	-	0
14	Muara Wis	-	-	-	-	-	-	-	0
15	Muara Muntai	-	-	-	-	-	-	-	0
16	Kenohan	-	-	-	-	-	-	-	0
17	Kembang janggut	-	-	-	-	-	-	-	0
18	Tabang	-	-	-	-	-	-	-	0
	Jumlah	14	0	0	0	1	1	5	21

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen PerencanaanStrategis

Perbandingan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini DenganTarget Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023
Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	64,50 Nilai	42,75	64,88%
Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak	17 kejadian	14 kejadian	100%

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023
Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas	3,92 %	3,99%	100%
Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	5,71 %	5,71%	100%

PENGUKURAN KINERJA DAN KEUANGAN

SASARAN STRATEGIS BADAN KESBANGPOL

Sasaran Strategis I :				Program :		
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	%
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 Nilai	95,20 Nilai	100	11.993.973.109	10.899.491.663	90,87
Sasaran Strategis II :				Program :		
Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat				Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		
Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100	2.777.086.056	1.877.173.360	67,60
Sasaran Strategis III :				Program :		
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas				Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		
Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	1,78%	2,19%	123	2.012.630.000	1.948.079.962	96,79
				Program :		
				Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		
Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Ketahanan Ekososbud	1,21%	1,77%	146	3.782.286.000	2.850.290.849	75,36
Sasaran Strategis IV :				Program :		

Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah				Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	%
Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	11,62%	14,76%	127	44.517.786.507	43.195.733.971	97,03
				Program :		
				Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
Persentase Ormas Yang Tertib Administrasi	9,9%	9,8%	98,99	298.000.000	215.500.000	72,32

Periode pembangunan Tahun 2021 s/d 2026, penyelenggaraan pembangunan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik, data yang dapat disajikan adalah data kinerja layanan yang secara rinci telah dikemukakan diatas dan data LPPD Kutai Kartanegara 2022. Badan Kesbangpol telah melakukan upaya-upaya konkrit berupa pembinaan politik di daerah dan pembinaan organisasi kemasyarakatan, LSM dan lain-lain. Pembinaan dilakukan pada Tahun 2021, pembinaan politik di daerah pada Tahun 2021 yaitu sebanyak 13 kegiatan, hal ini dilakukan dalam rangka pendidikan politik pada Tahun 2021, kegiatan ini diharapkan akan membawa hasil yakni peningkatan partisipasi politik masyarakat pada penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan untuk Tahun 2022 hingga 2024 capaian diharapkan bisa bertahan atau bahkan meningkat walaupun sesuai Permendagri 18 Tahun 2020 Badan Kesbangpol tidak terdapat IKK sebagaimana biasanya, namun Badan Kesbangpol tetap akan melakukan pengukuran sesuai dengan indikator yang ada sedangkan untuk pembinaan ormas juga meningkat walaupun terdapat regulasi yang membatasi dan untuk 2022 dan 2023 diharapkan akan sesuai dengan target pada renstra dengan didukung pendanaan yang memadai. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan OPD Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berkenaan. Selengkapnya dapat disampaikan pada tabel berikut:

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:													
	Indikator Tujuan:													
1	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Kesbangpol			Nilai	63,25	63,50	63,75	64,00	64,50	41,85	42,75	63,75	64,00	target tidak tercapai
2	Persentase permasalahan ipoleksosbudhankam yang ditindaklanjuti			Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	target tercapai
	Indikator Sasaran (IKU perangkat daerah):													

1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol			Nilai	63,25	63,50	63,75	64,00	64,50	41,85	42,75	63,75	64,00	target tidak tercapai
2	Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak			Kejadian	28	25	24	20	17	26	14	24	20	target tercapai
3	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas			Persen	2,68	2,99	3,33	3,63	3,92	2,9	3,99	3,33	3,63	capaian melebihi target
4	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi			Persen	4,4	4,5	5,53	5,62	5,71	4,6	5,71	5,53	5,62	capaian melebihi target
II	INDIKATOR PROGRAM:													
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			Nilai	86	87	88	89	90	86,16	95,2	88	89	capaian melebihi target
2	Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti			Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	target tercapai
3	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah			Persen	11,36	11,62	14,27	14,51	14,75	11,90	14,76	14,27	14,51	capaian melebihi target
4	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan			Persen	1,59	1,78	1,99	2,17	2,34	1,64	2,19	1,99	2,17	capaian melebihi target

5	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud			Persen	1,09	1,21	1,33	1,45	1,58	1,25	1,77	1,33	1,45	capaian melebihi target
6	Persentase ormas yang tertib administrasi			Persen	8,9	9,9	11,4	12,9	14,4	8,8	9,8	11,4	12,9	target tidak tercapai
III	INDIKATOR KEGIATAN:													
1	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			Dokumen/Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	target tercapai
2	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri			Dokumen/Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	target tercapai
3	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			Dokumen/Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	target tercapai
4	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya			Dokumen/Triwulan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	target tercapai
5	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			Dokumen	20	20	30	30	30	17	21	30	30	target tidak tercapai

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, Kajian terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dan Kajian terhadap Renstra maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel berikut :

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurangnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Masih lemahnya penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Badan Kesbangpol	1. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran belum memadai 2. Masih kurangnya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 3. Masih lemahnya tingkat disiplin aparatur 4. Kurangnya kompetensi SDM Aparatur 5. Kurangnya sistem pengawasan dan pengendalian terhadap pelaporan kinerja, keuangan dan aset 6. Masih terdapat inkonsistensi perencanaan kinerja
2	Situasi keamanan daerah yang belum stabil	Masih munculnya konflik dan gejolak di masyarakat	1. Masih lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat terkait peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Analisis yang belum maksimal terhadap dampak kebijakan pemerintah yang kontra dengan harapan masyarakat 3. Lemahnya pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di daerah
3		Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Ormas	1. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan serta isu toleransi 2. Semakin meningkatnya kasus penyakit masyarakat 3. Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi yang mengarah pada perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat 4. Beragamnya suku yang memunculkan ego kesukuan

			5. Kurangya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat 6. Masih berkembangnya ajaran paham radikalisme di kalangan masyarakat 7. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 8. Masih terdapat ormas yang belum memahami tentang administrasi penggunaan dana bantuan dari pemerintah
4		Menurunnya kualitas demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat dalam bidang politik 2. Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat tentang kehidupan demokrasi 3. Masih terdapat parpol yang belum memahami tentang administrasi penggunaan dana bantuan dari pemerintah

Berdasarkan pemetaan permasalahan diatas, akan kami sampaikan juga data pendukung terhadap permasalah tersebut sebagai berikut :

1. Masih lemahnya penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Badan Kesbangpol

a. Pelayanan administrasi perkantoran memang telah sepenuhnya dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa pelayanan yang belum bisa dilaksanakan sejak 2016, sehingga hanya yang bersifat prioritas yang tetap dilaksanakan.

b. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, berdasarkan data dari Pengurus Barang hanya terdapat 83 % sarana dan prasarana dalam kondisi baik yang dapat digunakan, sehingga perlu penambahan dan pemeliharaa sarana dan prasarana

c. Masih kurangya kompetensi SDM aparatur, hal ini karena sejak Tahun 2016 belum ada pendidikan dan pelatihan baik teknis dan fungsional yang memadai bagi aparatur Badan Kesbangpol

d. Predikat akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol masih perlu ditingkatkan berdasarkan data sebagai berikut :

Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol				
2018	2019	2020	2021	2022
B	BB	BB	A	AA

2. Masih tingginya angka konflik dan gejolak di masyarakat

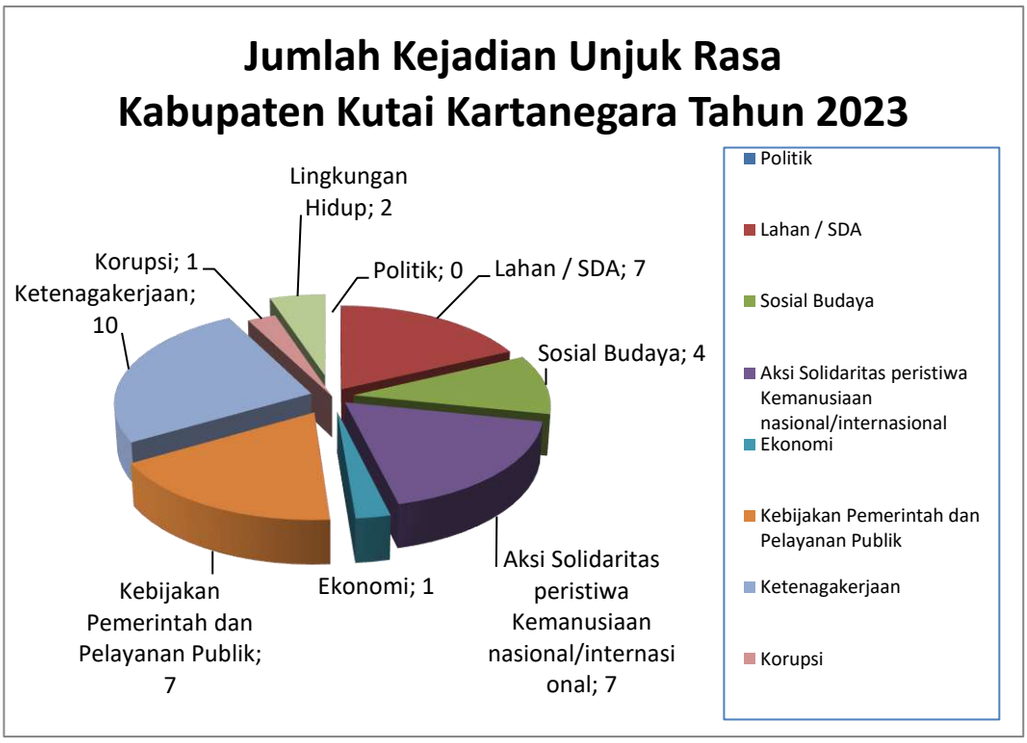

3. Data kasus penyakit masyarakat

Pantauan Kasus Penyakit Masyarakat Tahun 2021 – 2023

No.	Jenis Kriminal	2021	2022	2023
1	Narkoba	224	178	239
2	Pembunuhan	3	3	-
3	Kejahatan Seksual	1	3	2
4	Penganiayaan	22	32	15
5	Pencurian	17	36	16
6	Eksploitasi Anak Bawah Umur	24	25	15
7	Premanisme	0	5	6
	JUMLAH	291	282	293

4. Menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat

a. Data Ormas Kabupaten Kutai Kartanegara

Data Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar

Tahun 2018 – 2023

NO	ORMAS	TAHUN (JUMLAH)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	ORMAS	3	4	12	10	8	14
2.	OKP	-	-	-	-	4	
3.	LSM	-	2	-	2	-	-
4.	PAGUYUBAN	2	3	-	-	-	-
5.	AGAMA	-	1	2	1	3	-
6.	PROFESI	2	-	-	-	-	1
7.	LEMBAGA ADAT	1	-	-	-	-	1
8.	YAYASAN	-	2	2	4	2	5
	JUMLAH	8	12	16	17	17	21

b. Data Partisipasi Pemilih Kabupaten Kutai Kartanegara

Data Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu dan Pemilukada Tahun 2015-2020

INDIKATOR	2015	2016	2018	2019	2020
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	Pilbup : 58,93%	Pilkades : 70,06%	Pilgub : 60,44	Pileg/Pilpre 81,24	Pilbup 57,00

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan

Tantangan dalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi Potensi Kerawanan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, Politisasi Nilai-Nilai Agama, dan Menepisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum.

1) Potensi Kerawanan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

   Karakteristik Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihuni oleh masyarakat yang heterogen, mempunyai potensi kerawanan sosial, politik dan kewilayahan, yang dapat mengarah pada konflik sosial yang berdimensi vertikal dan horisontal. Kondisi kemajemukan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang rawan konflik, implementasi otonomi daerah yang belum konsisten, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi yang masih signifikan, makin rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya penegakan hukum, serta pelanggaran HAM mendorong munculnya tirani sosial/massa yang mengarah pada anarkhisme.

2) Politisasi Nilai-Nilai Agama

   Masih berakarnya politisasi nilai-nilai agama sebagai bagian dari pertentangan kepentingan politik dan kekuasaan masih terjadi pada masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama beberapa Tahun terakhir. Iklim kebebasan telah membuat kelompok primordial menegaskankeberadaan di dalam masyarakat, bahkan dengan tidak ragu-ragu menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya.

3) Menipisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum

Pada saat proses politik yang demokratis dan praktek hukum yang berkeadilan justru sangat diperlukan pada saat seperti sekarang ini, namun secara bersamaan terjadi pula penipisan kepercayaan masyarakat luas terhadap lembaga politik dan hukum. Perasaan diperlakukan tidak adil dan sikap-sikap sinis dan pesimisme yang meluas, memunculkanberbagai ungkapan kejengkelan dan ejekan terhadap dunia peradilan, antara lain berupa tuduhan"mafia peradilan" kepada dunia kehakiman, kejaksaan dan kepolisian sebagi tritunggal penegak hukum Indonesia. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang pada masa lalu kurang diakui peranannya, dewasa ini mulai menunjukkan peran yang baik dalam memberdayakan sektor masyarakat menuju ke arah terbentuknya masyarakat modern *(civil society)* yang tangguh.

4) Perkembangan Dinamika Politik Masyarakat

Seiring dengan perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Terkait dengan dinamika politik, saat ini masyarakat dapat menyikapi setiap perkembangan yang ada secara cerdas dan bijaksana, proaktif dan bertindak positif.

5) Perubahan Paradigma Pelayanan Publik.

Dengan adanya perubahan perundang-undangan, terjadi pergeseran fungsi utama Pemerintah Daerah yang semula Sebagai "Promotor Pembangunan" berubah menjadi "Pelayan Masyarakat". Perubahan diatas sejalan paradigma good governance yang memberikan tekanan pada manajemen pemerintahan, termasuk manajemen pelayanan publik. Pemerintah tidak lagi berposisi sebagai penguasa dengan sifat hubungan hierarkis dengan masyarakat, melainkan sebagai mitra yang berkedudukan heterarkhis dengan komponen lainnya (sektor swasta dan masyarakat).

6) Sinkronisasi Kebijakan Pusat di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam mewujudkan harmoni sosial masyarakat, Pemerintah berupaya meningkatkan berbagai perangkat perundang-

undangan/ Peraturan yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat. Peraturan-peraturan tersebut baik terkait dengan program dan kegiatan maupun forum-forum masyarakat maupun instansi terkait yang membawa konsekuensi ke daerah untuk memfasilitasi kebijakan tersebut. Peraturan-peraturan tersebut antara lain pembentukan tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Peluang

Berdasarkan tantangan utama di atas, serta sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, maka diperkirakan memiliki peluang sekaligus memungkinkan untuk melaksanakan upaya-upaya yang terkait dengan :

1) Peningkatan Persatuan dan Kesatuan

Peluang dan upaya ini ditujukan untuk menyepakati makna penting persatuan dan kesatuan bangsa dalam konstelasi politik yang sudah berubah, yang dapat dilakukan dengan kegiatan pokok membangun dan melaksanakan sistem deteksi dini atau *early warning system* untuk merespon berbagai persoalan konflik sosial politik, membangun dan memperluas mekanisme dan jaringan kerjasama seluruh *stakeholders*bangsa untuk menyelesaikan berbagai persoalan konflik sosial politik, melaksanakan gerakan kampanye ataupun bentuk-bentuk advokasi lainnya secara serentak untuk meningkatkan komitmen yang utuh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, serta melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia.

2) Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik

Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan kelembagaan yang lebih kokoh dan optimalisasi fungsi-fungsi dan hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta kemasyarakatan, sejalan dengan amanat konstitusi. Dalam kaitan ini, Badan

Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kualitas lembaga-lembaga penyelenggara Negara, utamanya lembaga legislatif daerah, memberikan bantuan keuangan terhadap partai politik, memberdayakan dan menata lembaga-lembaga kemasyarakatan, mensosialisasikan perlunya mendukung keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan fungsi dan peran yang digariskan oleh konstitusi, serta melembagakan mekanisme kerjasama antar institusi negara dan antara institusi negara dan masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi.

3) Pemulihan Wilayah Pasca Konflik

Stabilitas politik dan pasca konflik merupakan agenda penting bagi upaya mewujudkan proses demokratisasi, persatuan dan kesatuan bangsa, iklim usaha yang kondusif serta terjaganya ketertiban umum di daerah. Beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi terutama terkait dengan *excess* dan *dispute* yang potensial terjadi di beberapa daerah sebagai implikasinya. Hal ini memerlukan perhatian dan upaya-upaya terstruktur dalam proses pembinaan politik yang demokratis di tingkat lokal serta peningkatan wawasan kebangsaan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan itu, upaya penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu tetap dipelihara.

4) Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, maka para *stakeholder* (Partai politik, tokoh politik, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya) diharapkan untuk berperan lebih aktif dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat.Penguatan dalam meningkatkan partisipasi politik melibatkan Partai Politik dan Tokoh Masyarakat

5) Peningkatan Budaya Multikultural dan Toleransi

Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara sangatlah beraneka ragam, termasuk didalamnya sistem religi atau sistem kepercayaan yang hidup dan diyakini oleh masyarakat. Dalam membangun sikap multikultural, maka upaya yang perlu

dilakukan adalah meningkatkan pemahaman kepada masyarakat untuk saling menghargai dan menjunjung tinggi sikap toleransi sosial tanpa membeda-bedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.

6) Peningkatan Sumber Daya Manusia Bakesbangpol

Dalam menunjang kinerja SDM Bakesbangpol, perlu upaya-upaya peningkatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dengan harapan meningkatnya kinerja aparatur Bakesbangpol yang handal dan profesional.

7) Peningkatan Anggaran

Dengan cakupan area dan wilayah pembangunan kesatuan bangsa dan politik, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dapat terpenuhinya secara proporsional jumlah alokasi anggaran yang diperlukan dalam meningkatkan peran di area pembinaan tersebut.

8) Sarana dan Prasarana

Dengan cakupan area dan wilayah pembangunan kesatuan bangsa dan politik, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dapat terpenuhinya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pembinaan dan pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang dimiliki serta visi, misi program Bupati dan Wakil Bupati, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

A. Tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan amanah reformasi dan tuntutan masyarakat tentang rendahnya kinerja sumber daya aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja, rendahnya kualitas pelayanan umum

B. Adanya Aspirasi atau harapan masyarakat yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah yang akan memicu terjadinya

konflik dan gejolak di masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas daerah.

C. Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi dapat menimbulkan ekses dekadensi moral yang bisa mengarah pada perubahan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. Munculnya isu paham radikalisme di kalangan masyarakat, sehingga kita harus meningkatkan lagi pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, Wawasan Kebangsaan dan semangat bela negara

E. Penciptaan iklim demokratis di Kabupaten Kutai Kartanegara

F. Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan, melalui penguatan forum-forum bentukan pemerinta

Berdasarkan isu-isu strategis diatas, Badan Kesbangpol akan menindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

1. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial serta sub kegiatan :
    a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
    b. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan serta sub kegiatan :
    a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya serta sub kegiatan :
   a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
   b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan serta sub kegiatan :
   a. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
   5. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik serta sub kegiatan :
      a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

b. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Untuk rumusan seluruh permasalahan beserta Langkah tindak lanjut tergambar pada tabel sebagai berikut :

MASALAH DAN ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	2	3	4	5	6
1	Situasi kondusifitas daerah yang belum stabil	Masih munculnya konflik dan gejolak di masyarakat	Analisis yang belum maksimal terhadap dampak kebijakan pemerintah yang kontra dengan harapan masyarakat	Pemerintah memfasilitasi seluruh stake holders terkait dalam suatu Forum/Tim dalam penyelesaian berbagai konflik dan gejolak yang timbul serta perlunya uapaya monitoring dan penyajian analisis yang akurat terhadap dampak yang akan timbul dari potensi kerawanan yang mengganggu situasi kondusifitas daerah	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
2			Lemahnya pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di daerah			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
3			Masih lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat terkait peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

6			Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan serta isu toleransi	Pelaksanaan Program Paskibraka dan Purna Paskibraka dan Duta Pancasila sebagai upaya pendidikan wasbang dan pancasila kepada generasi muda	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
7		Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Ormas	Semakin meningkatnya kasus penyakit masyarakat	Pemerintah melaksanakan program pendidikan wawasan kebangsaan dan melakukan sosialisasi dan melaksanakan ToT bagi para pengajar tentang wawasan kebangsaan dan pancasila serta sosialisasi dan penyuluhan		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8			Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi yang mengarah pada perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat	Pemerintah melakukan pencegahan melalui sosialisasi dan kegiatan yang positif bagi para pemuda khususnya dan kepada masyarakat luas pada umumnya		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
9			Beragamnya suku yang memunculkan ego kesukuan	Pemerintah melakukan fasilitasi terhadap organisasi masyarakat yang ada terhadap segala aspek ormas tersebut	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
			Kurangya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

			Masih berkembangnya ajaran paham radikalisme di kalangan masyarakat			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
			Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			Masih terdapat ormas yang belum memahami tentang administrasi penggunaan dana bantuan dari pemerintah			Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
10		Menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat	Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat dalam bidang politik	Pemerintah melakukan upaya pendidikan politik bagi masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

11			Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat tentang kehidupan demokrasi	Melakukan upaya monitoring terhadap perkembangan kehidupan politik di Kab. Kukar		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
12			Masih terdapat parpol yang belum memahami tentang administrasi penggunaan dana bantuan dari pemerintah	Pemerintah memfasilitasi dan memberikan pelatihan bagi masyarakat dan pengurus partai politik		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Pada rancangan RKPD Tahun 2025 telah ditetapkan 6 (enam) prioritas pembangunan daerah 2025 dimana Badan Kesbangpol termasuk pada prioritas kedua yaitu “Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil”. Dalam rancangan awal ini perangkat daerah harus menjabarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dengan sasaran dan indikator dalam RPJMD yang akan diselaraskan dengan RENSTRA dan diturunkan dalam perencanaan Tahunan dalam RENJA OPD, adapun prioritas pembangunan yang dilaksanakan Badan Kesbangpol di dalam rancangan RKPD 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Prioritas 2 Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil

PRIORITAS DAERAH	FOKUS PEMBANGUNAN	POKOK BAHASAN	PERMASALAHAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2025
Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan	pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting	penguatan forum Masyarakat dan Belum adanya informasi terkait kemiskinan dan Stunting dari OPD Pengampu yang nantinya bisa dilaksanakan oleh Forum-forum di bawah koordinasi Badan Kesbangpol	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	14,51%
				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	2,17%
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud	1,45%
				Program Pemberdayaan Dan	Persentase ormas yang	12,90%

				Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	tertib administrasi	
Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN	Penguatan kewaspadaan dini dalam kehidupan kemasyarakatan di lokasi sekitar IKN	pemberdayaan masyarakat terkait kewaspadaan dini potensi konflik di lokasi sekitar IKN	penguatan kewaspadaan dini	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%

Rancangan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD 2021-2026 telah memuat program beserta pagu indikatif OPD dan setelah dilakukan perbandingan dengan hasil analisis kebutuhan pada Badan Kesbangpol pada Tahun 2025 yang dilakukan sesuai prioritas Badan Kesbangpol sebagai berikut :

No	Prioritas OPD	Keterangan
1	Penguatan Forum-Forum Bentukan Pemerintah melalui Pemberdayaan Masyarakat	FPK, FKUB, FKDM DAN JPM
2	Penciptaan Iklim Demokratis dan Kondusif Pasca Pemilu dan Pemilukada Serentak Tahun 2024	• Penguatan Pendidikan Politik ke seluruh lapisan aparatur dan Masyarakat • Pengutan Deteksi Dini Kejadian Konflik • Peningkatan besaran Bankeu Parpol
3	Pelaksanaan Tugas Paskibraka dan Purna Paskibraka	Pembentukan Duta Pancasila
4	Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Pencegahan Paham Radikalisme	Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi di seluruh kecamatan
5	Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi di seluruh kecamatan dan tes urine
6	Penguatan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Sosialisasi dan Pengawasan Ormas serta Ormas Award

Dari penjabaran rancangan RKPD Tahun 2025 yang telah disesuaikan dengan hasil analisa kebutuhan OPD tersebut dijabarkan lagi menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 berdasarkan pagu indikatif dimana terdapat perbedaan terkait perubahan kegiatan dan besaran pagu indikatif antara Rancangan dan Rancangan Akhir yang disebabkan oleh acuan ketersediaan pagu indikatif, maka hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan bagian tentang program dan kegiatan.
Proses ini sangat diperlukan untuk mendeteksi dini perencanaan yang baik dimulai dari RPJMD, RKPD, Renstra OPD hingga Renja OPD. Selengkapnya review terhadap rancangan RKPD Tahun 2025 dapat disampaikan pada tabel berikut :

TABEL T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	RANCANGAN RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89	12.065.355.070,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89	12.808.529.350,00	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	130.000.000,00	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	750.000.000,00	
1						PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Tenggarong, Panji	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000,00	

2						PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Tenggarong, Panji	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 berita acara	50.000.000,00	
3						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera	1 laporan	150.000.000,00	
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong, Panji	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	50.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong, Panji	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	450.000.000,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	80.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	50.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	20 laporan	8.666.032.208,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	20 laporan	8.858.211.273,00	

6						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong, Panji	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	25.000.000,00	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong, Panji	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	900 orang/ bulan	8.517.272.208,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong, Panji	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	900 orang/ bulan	8.692.571.273,00	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	25.000.000,00	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	128.760.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	115.640.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	3 dokumen	40.800.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	3 dokumen	105.000.000,00	
10						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	25.000.000,00	

11						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tenggaro ng, Panji	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	50.000.00 0,00	
12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggaro ng, Panji	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	40.800.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggaro ng, Panji	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	30.000.00 0,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	466.296.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	168.552.0 00,00	
13	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggaro ng, Panji	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	186 paket	366.296.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggaro ng, Panji	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	62 paket	148.552.0 00,00	
14	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggaro ng, Panji	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 orang	100.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggaro ng, Panji	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 orang	20.000.00 0,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 layanan	930.243.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 layanan	468.393.0 00,00	

15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong, Panji	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	5.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong, Panji	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	5.000.000,00	
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong, Panji	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 paket	100.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong, Panji	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 paket	50.000.000,00	
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong, Panji	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 paket	25.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong, Panji	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 paket	25.000.000,00	
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong, Panji	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	50.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong, Panji	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	38.150.000,00	
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 kecamatan dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 laporan	700.243.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 kecamatan dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 laporan	300.243.000,00	
20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2500 dokumen	50.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2500 dokumen	50.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	250.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	1.680.000.000,00	

21						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong, Panji	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 unit	1.280.000.000,00	Penambahan utk peralatan elektronik dan kebutuhan PPID
22						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong, Panji	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	320.000.000,00	Penambahan utk peralatan elektronik dan kebutuhan PPID
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong, Panji	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24 unit	250.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong, Panji	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24 unit	80.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	1.171.983.862,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	508.373.077,00	
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.000.000,00	
25	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	202.959.076,00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	126.589.669,00	

26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	968.024.786,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	380.783.408,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	410.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	270.000.000,00	
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong, Panji	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 unit	70.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong, Panji	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 unit	70.000.000,00	
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong, Panji	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 unit	250.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong, Panji	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 unit	110.000.000,00	
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong, Panji	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 unit	40.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong, Panji	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 unit	40.000.000,00	
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong, Panji	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	50.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong, Panji	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	50.000.000,00	

	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	2,17%	8.000.000.000,00	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	2,17%	6.050.000.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	12 dokumen	8.000.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	12 dokumen	6.050.000.000,00	
31	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.800 orang	7.500.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.400 orang	5.550.000.000,00	Fasilitasi Kegiatan Paskibraka, Fasilitasi FPK, JPM dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Pemuda Pemudi Lintas Suku

32	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10 kecamatan (loa kulu, sanga sanga, ma. Jawa, ma. Badak, kota bangun darat, ma. Wis, sebulu, kenohan, samboja barat dan tabang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	600 orang	500.000.000,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10 kecamatan (loa kulu, sanga sanga, ma. Jawa, ma. Badak, kota bangun darat, ma. Wis, sebulu, kenohan, samboja barat dan tabang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	600 orang	500.000.000,00	Kegiatan Pembentukan Kader Bela Negara di 20 kecamatan dan pembinaan karakter kebangsaan
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	14,51%	4.831.992.000,00	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	14,51%	4.331.992.000,00	

	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri	12 dokumen	4.831.992.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri	12 dokumen	4.331.992.000,00	

33	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.000 orang	1.000.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.000 orang	500.000.000,00	Penambahan untuk kegiatan pendidikan politik bagi pemilih pemula, perempuan, komunitas, ormas, aparatur desa/kelurahan dan RT

34	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	48 orang	3.581.992.000,00	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	48 orang	3.581.992.000,00	Fasilitasi kenaikan nilai per suara Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik hasil pemilu Tahun 2024

35	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	24 laporan	250.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	24 laporan	250.000.000,00	Monitoring pemantauan dan perkembangan politik di daerah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase ormas yang tertib administrasi	12,90%	700.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase ormas yang tertib administrasi	12,90%	700.000.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30 dokumen	700.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30 dokumen	700.000.000,00	

36	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	840 orang	700.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	840 orang	700.000.000,00	Fasilitasi dan Pengawasan Ormas, serta Sosialisasi terhadap Ormas dan pelaksanaan ormas award dan koordinasi di ULA Kemendagri terkait SKT Ormas
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud	1,45%	2.100.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud	1,45%	1.202.429.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	5 dokumen	2.100.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	5 dokumen	1.202.429.000,00	

37	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.800 orang	1.800.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.300 orang	902.429.000,00	Fasilitasi FKUB, BNNK, Kemah Pemuda Pemudi Lintas Agama, pelaksanaan assesment pengguna narkotika dan pembelian tes kit narkoba
38	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	35 laporan	300.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	35 laporan	300.000.000,00	Fasilitasi Ketahanan Ekonomi untuk sosialisasi pekat di bidang ketahanan ekonomi

	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	2.700.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	2.200.000.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12 dokumen	2.700.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12 dokumen	2.200.000.000,00	

39	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.000 orang	1.200.000.000,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	800 orang	700.000.000,00	Fasilitasi FKDM, Monitoring TKA, Sosialisasi Radikalisme, Deteksi Dini
40	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	20 kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	50 dokumen	1.500.000.000,00	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	20 kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	50 dokumen	1.500.000.000,00	Fasilitasi Forkopimda dalam penanganan konflik dan gejolak masyarakat
	JUMLAH				30.397.347.070,00	JUMLAH				27.292.950.350,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini, Badan Kesbangpol tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang masuk dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD, hal ini disebabkan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol untuk pembentukan karakter masyarakat dan pencegahan konflik serta peningkatan partisipasi politik masyarakat dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan

dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan yang jelas dan sinergis harus selaras dengan Visi dan Misi serta memperhatikan potensi dan stabilitas daerah.

Rencana Strategis yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen perencanaan tersebut disusun dan dirumuskan setiap lima Tahun, memuat strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan dan diimplementasikan melalui Program dan kegiatan-kegiatan.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, diwujudkan melalui sembilan Misi, yang dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

RKP 2025 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Dari visi dan agenda pembangunan tersebut, dalam visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat kesesuaian yang merupakan penjabaran dari visi dan misi tersebut. Adapun agenda pembangunan yang ditetapkan untuk mewujudkan visi RPJMN Tahun 2020 – 2024 tersebut adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dari agenda pembangunan tersebut yang sesuai dengan tugas fungsiBadan Kesatuan Bangsa danPolitik Kabupaten Kutai Kartanegara adalah di misi ke 4 dan 7.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri	Masih kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	Merupakan Tupoksi Badan Kesbangpol Kab. Kukar	Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan serta tingginya ego kesukuan Kurangya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi yang mengarah pada perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Lemahnya pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di daerah Semakin meningkatnya kasus penyakit masyarakat

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026, visi Perangkat Daerah telah selaras dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yaitu :

"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara
Yang Sejahtera dan Berbahagia"

Guna mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026 diatas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara perwujudan *Misi Kesatu* dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut :

"Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani"

Dalam penjabaran misi tersebut Badan Kesbangpol telah menuangkan ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tabel 3.1

TUJUAN OPD

MISI 1 RPJMD	TUJUAN MISI 1 RPJMD	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN
Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Badan Kesbangpol	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Kesbangpol
		Terwujudnya Situasi yang Kondusif di Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase permasalahan ipoleksosbudhankam yang diselesaikan

Tabel 3.2

SASARAN OPD

SASARAN RPJMD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	MeningkatnyaTransparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak
	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas
	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi

Diagram Impact

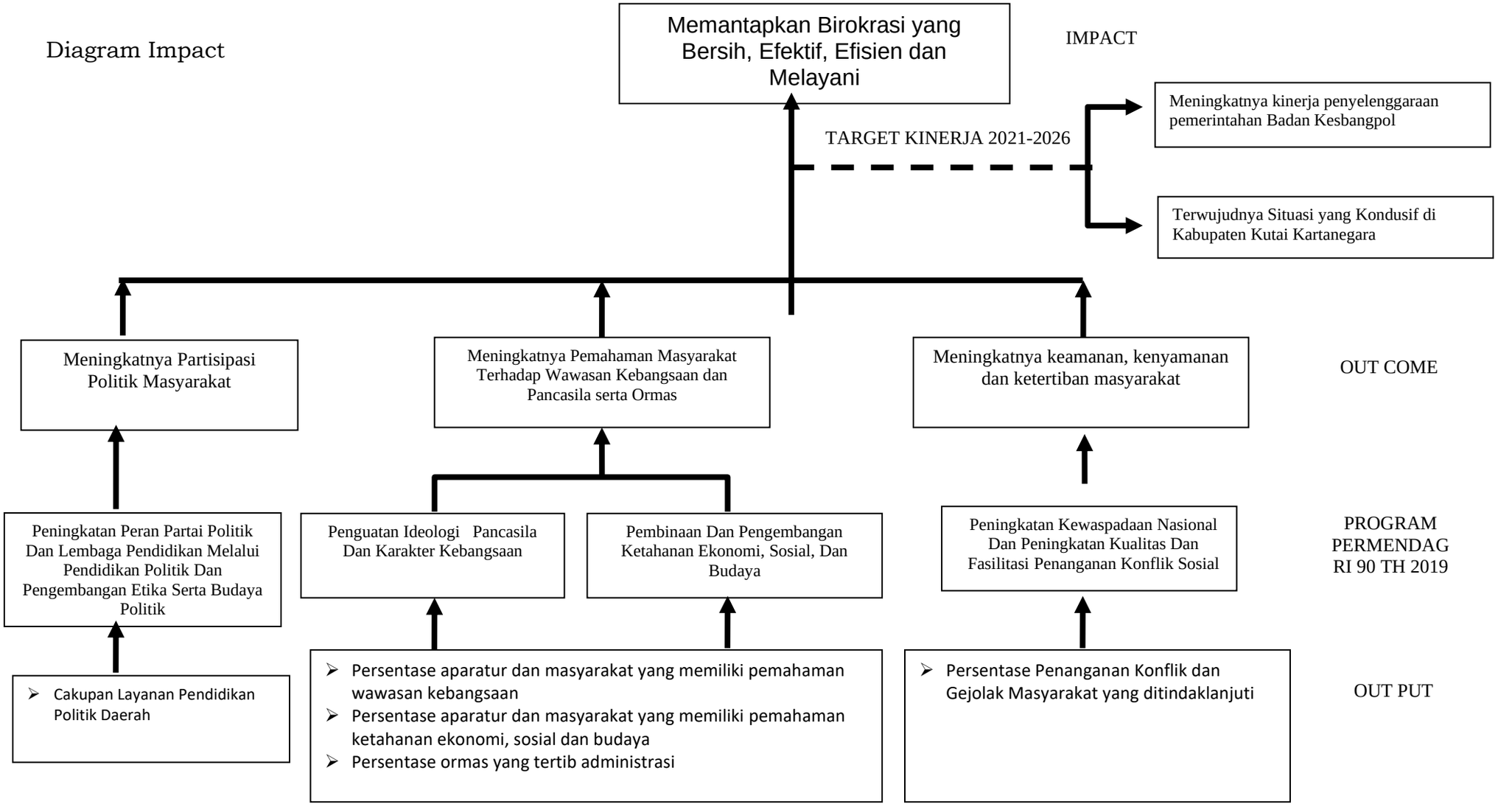

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran Tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perubahan renstra Tahun 2021 – 2026. Pada dasarnya rencana kerja Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2025. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran Tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program dan kegiatan serta sub kegiatan baik yang telah ditentukan dalam renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik badan sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan parameter serta acuan dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan serta sub kegiatan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025 yang juga merupakan kelanjutan dari indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada periode Renstra Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Cara Hitung
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	64,00 nilai	Nilai Pelaksaaan Reformasi Birokrasi

2	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak	20 kali	Jumlah konflik dan gejolak yang terjadi
3	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas	Persentase Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas	3,63%	Jumlah masyarakat dan aparatur yang paham wasbang dan pancasila serta ormas dibagi Jumlah masyarakat kukar yang memenuhi syarat/DPT
4	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	5,62%	Jumlah Aparatur dan Masyarakat yang paham Terhadap Demokrasi dibagi Jumlah penduduk yang memenuhi syarat/yang masuk dalam DPT

a) Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 dan pencapaian target kinerja Badan Kesbangpol sebagaimana yang telah termuat pada Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021 – 2026, sehingga pada Tahun anggaran 2025 dalam perumusan program dan kegiatan serta sub kegiatan, terdapat beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan selain adanya program kegiatan yang belum dilaksanakan pada Tahun sebelumnya serta ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum tercapai tingkat kinerjanya, disamping program dan kegiatan tersebut telah sesuai dengan Renstra, sebagai berikut :

1. Tertangkapnya terduga jaringan teroris dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga diperlukan upaya

lebih dalam pencegahan dan penanganannya terutama dalam pencegahan munculnya paham radikalisme

2. Masih banyaknya masalah sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan tambang maupun perkebunan, terutama lahan pada lokasi Ibu Kota Nusantara
3. Pencegahan dan penanganan konflik dalam rangka pasca pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024
4. Terdapat kenaikan harga dan kelangkaan barang kebutuhan pokok masyarakat yang berdampak timbulnya gejolak di masyarakat
5. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan faham-faham keagamaan yang mengatasnamakan agama yang berdampak pada SARA
6. Kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat tentang wawasan kebangsaan, sehingga kita harus meningkatkan lagi pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, Wawasan Kebangsaan dan semangat bela negara
7. Masih tingginya angka penyakit masyarakat terutama peredaran dan penyalahgunaan Narkoba
8. Penguatan Forum-Forum Bentukan Pemerintah (FKUB, FPK dan FKDM) serta Jejaring Panca Mandala dan organisasi lainnya
9. Walaupun tidak terdapat pemilu pada Tahun 2025, Badan Kesbangpol tetap berkomitmen melakukan Pendidikan politik kepada seluruh lapisan Masyarakat.
10. Adanya peraturan baru terhadap pelaksanaan fasilitasi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan pembentukan Duta Pancasila yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol
11. Penguatan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, melalui Sosialisasi dan Pengawasan Ormas serta Ormas Award

b) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi terutama dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan

keuangan daerah, maka diperlukan penyesuaian pada Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026 dan Rencana kerja Tahunan Tahun 2025 dan target kegiatan Tahun 2025 banyak mengalami perubahan baik dari jumlah program maupun jenis kegiatannya serta sub kegiatan. Adapun jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2025 sesuai dengan hasil analisis kebutuhan terdiri dari :

1. Untuk kegiatan generik terdiri dari 1 program, 8 kegiatan dan 22 sub kegiatan
2. Untuk kegiatan non generik terdiri dari 5 program, 5 kegiatan dan 10 sub kegiatan
3. Sehingga seluruhnya berjumlah 6 program, 13 kegiatan dan 32 sub kegiatan

Kemudian penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesbangpol Tahun 2025 disesuaikan dengan Rancangan RKPD Tahun 2025 yang memuat program prioritas dan program dedikasi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, dimana dalam hal tersebut Badan Kesbangpol termasuk sebagai OPD pendukung dalam 2 (dua) program dedikasi sebagai berikut :

1. Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA)
   Terkait dengan program tersebut Badan Kesbangpol sebagai OPD pendukung dari OPD utama yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika dan memiliki tugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan aplikasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Badan Kesbangpol
2. Program Gerakan Etam Mengaji IDAMAN (GEMA IDAMAN)
   Dalam program ini Badan Kesbangpol sebagai OPD pendukung dari OPD utama yaitu Sekretariat Kabupaten yang memiliki tugas untuk menginventarisir rumah-rumah ibadah di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini Badan Kesbangpol memberikan dukungan berupa pelaksanaan fasilitasi terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi terhadap pendirian rumah-rumah ibadah di Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Dari hal tersebut Badan Kesbangpol telah terakomodir ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesbangpol untuk perencanaan Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

PROGRAM RENJA KESBANGPOL TAHUN 2025

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator
Peningkatan Fasilitasi Penyelenggaraan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan konflik dan gejolak di masyarakat	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti
	Peningkatan pelaporan deteksi dini situasi Ipoleksosbudhankam		
	Peningkatan pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing		
Peningkatan Fasilitasi Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri	Peningkatan upaya penyuluhan pendidikan politik bagi masyarakat	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah
	Peningkatan pelaporan perkembangan politik di daerah		
	Penguatan kapasitas kelembagaan parpol		
	Peningkatan fasilitasi pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan Pemilu		
Peningkatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Peningkatan pembinaan tentang wawasan kebangsaan dan pancasila kepada aparatur dan masyarakat	. Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan
Peningkatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya,Agama dan Ormas	Peningkatan pembinaan tentang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	. Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud

	Peningkatan fasilitasi pemerintah daerah terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika	. Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	Persentase ormas yang tertib administrasi
	Penguatan kapasitas dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		

c) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Meskipun demikian dari rencana program dan kegiatan tersebut diatas, terdapat perbedaan dengan rancangan RKPD, hal tersebut disebabkan sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan pada satuan di renstra karena menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
2. Penambahan besaran dana pengelola keuangan Badan Kesbangpol
3. Penambahan Sub Kegiatan utk Pengadaan pakaian dinas harian dan pakaian dinas lapangan ASN Kesbangpol yang sudah rusak
4. Penambahan untuk biaya kontribusi mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Kesbangpol
5. Penambahan untuk kegiatan pameran dan pawai pembangunan
6. Penambahan biaya cetak NCR
7. Penambahan utk keperluan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
8. Penambahan utk peralatan elektronik dan kebutuhan PPID
9. Penambahan untuk pembiayaan rumah sekretariat BNNK dan Forum
10. Penambahan utk kenaikan BPJS dan penyediaan jasa tenaga kebersihan
11. Penambahan untuk sewa kendaraan dinas operasional

12. Fasilitasi Kegiatan Paskibraka, Fasilitasi FPK, JPM dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Pemuda Pemudi Lintas Suku
13. Kegiatan Pembentukan Kader Bela Negara di 20 kecamatan dan pembinaan karakter kebangsaan
14. Penambahan untuk kegiatan pendidikan politik bagi pemilih pemula, perempuan, komunitas, ormas, aparatur desa/kelurahan dan RT
15. Fasilitasi kenaikan nilai per suara Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik hasil pemilu Tahun 2024
16. Monitoring pemantauan dan perkembangan politik di daerah
17. Fasilitasi dan Pengawasan Ormas, serta Sosialisasi terhadap Ormas dan pelaksanaan ormas award dan koordinasi di ULA Kemendagri terkait SKT Ormas
18. Fasilitasi FKUB, BNNK, Kemah Pemuda Pemudi Lintas Agama, pelaksanaan assesment pengguna narkotika dan pembelian tes kit narkoba
19. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi untuk sosialisasi pekat di bidang ketahanan ekonomi
20. Fasilitasi FKDM, Monitoring TKA, Sosialisasi Radikalisme, Deteksi Dini untuk menyikapi hal tersebut, Badan Kesbangpol telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
    1. Melakukan penyesuaian terhadap kegiatan generik, baik dalam penyesuaian target kinerja hingga penundaan kegiatan.
    2. Melakukan penentuan kegiatan prioritas dengan memberikan peringkat terhadap kegiatan yang dianggap sangat prioritas
    3. Adapun sub kegiatan yang dianggap sangat prioritas dapat diurut sebagai berikut :
        a) Prioritas 1
        - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

b) Prioritas 2

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

d) Tabel rencana program dan kegiatan

Adapun perincian kegiatan Tahun 2025 dihubungkan dengan sumber dana dan ekspektasi pembiayaan untuk menjalankan program dan kegiatan serta prakiraan maju rencana maju Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

TABEL T-C. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.01	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		89	12.808.529.350,00	APBD II		90	10.058.095.208,00
	8.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 dokumen	750.000.000,00	APBD II		6 dokumen	130.000.000,00
1	8.01.01.2.01.01	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong, Panji	1 dokumen	50.000.000,00	APBD II		-	
1	8.01.01.2.01.01	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong, Panji	1 berita acara	50.000.000,00	APBD II		-	

1	8.01.01.2.01.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera	Tenggarong, Panji	1 laporan	150.000.000,00	APBD II		-	-
1	8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong, Panji	3 dokumen	450.000.000,00	APBD II		3 dokumen	50.000.000,00
2	8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong, Panji	3 laporan	50.000.000,00	APBD II		3 laporan	80.000.000,00
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		20 laporan	8.858.211.273,00	APBD II		20 laporan	8.652.912.208,00
3	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong, Panji	900 orang/bulan	8.692.571.273,00	APBD II		900 orang/bulan	8.517.272.208,00
1	8.01.01.2.02.01	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong, Panji	1 dokumen	25.000.000,00	APBD II		-	-
4	8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong, Panji	1 laporan	25.000.000,00	APBD II		1 laporan	20.000.000,00
5	8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong, Panji	18 laporan	115.640.000,00	APBD II	Penambahan besaran dana pengelola keuangan Badan Kesbangpol	18 laporan	115.640.000,00

	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		3 dokumen	105.000.000,00	APBD II		3 dokumen	40.800.000,00
2	8.01.01.2.03.05	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong, Panji	1 dokumen	25.000.000,00	APBD II		-	-
5	8.01.01.2.03.05	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong, Panji	1 laporan	50.000.000,00	APBD II		-	-
6	8.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong, Panji	3 laporan	30.000.000,00	APBD II		3 laporan	40.800.000,00
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		4 dokumen	168.552.000,00	APBD II		4 dokumen	20.000.000,00
7	8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tenggarong, Panji	186 paket	148.552.000,00	APBD II	Penambahan Sub Kegiatan utk Pengadaan pakaian dinas harian dan pakaian dinas lapangan ASN Kesbangpol yang sudah rusak	75 orang	20.000.000,00
8	8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong, Panji	75 orang	20.000.000,00	APBD II	Penambahan untuk biaya kontribusi mengikuti kegiatan	75 orang	20.000.000,00

								peningkatan kompetensi SDM Aparatur Kesbangpol		
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		6 layanan	468.393.000,00	APBD II		6 layanan	478.383.000,00
9	8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tenggarong, Panji	4 paket	5.000.000,00	APBD II		4 paket	5.000.000,00
10	8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tenggarong, Panji	29 paket	50.000.000,00	APBD II	Penambahan untuk kegiatan pameran dan pawai pembangunan	29 paket	50.000.000,00
11	8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tenggarong, Panji	38 paket	25.000.000,00	APBD II		38 paket	25.000.000,00
12	8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tenggarong, Panji	5 paket	38.150.000,00	APBD II	penambahan biaya cetak NCR	5 paket	40.000.000,00
13	8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 kecamatan dan luar daerah	450 laporan	300.243.000,00	APBD II	Penambahan utk keperluan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	225 laporan	308.383.000,00
14	8.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong, Panji	2500 dokumen	50.000.000,00	APBD II		2500 dokumen	50.000.000,00

	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		100%	1.680.000.000,00	APBD II		100%	90.000.000,00
15	8.01.01.2.07.10	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tenggarong, Panji	4 unit	1.280.000.000,00	APBD II	Penambahan utk peralatan elektronik dan kebutuhan PPID	-	-
15	8.01.01.2.07.10	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tenggarong, Panji	1 unit	320.000.000,00	APBD II	Penambahan utk peralatan elektronik dan kebutuhan PPID	-	-
15	8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tenggarong, Panji	24 unit	80.000.000,00	APBD II		10 unit	90.000.000,00
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 bulan	508.373.077,00	APBD II		12 bulan	508.383.077,00
16	8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong, Panji	12 laporan	1.000.000,00	APBD II		12 laporan	1.000.000,00
17	8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tenggarong, Panji	24 laporan	126.589.669,00	APBD II	Penambahan untuk pembiayaan rumah sekretariat BNNK dan Forum	12 laporan	126.599.669,00

18	8.01.01.2.01.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tenggarong, Panji	24 laporan	380.783.408,00	APBD II	Penambahan utk kenaikan BPJS dan penyediaan jasa tenaga kebersihan	12 laporan	380.783.408,00
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100%	270.000.000,00	APBD II		100%	290.000.000,00
19	8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tenggarong, Panji	30 unit	70.000.000,00	APBD II		30 unit	80.000.000,00
20	8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tenggarong, Panji	40 unit	110.000.000,00	APBD II	penambahan untuk sewa kendaraan dinas operasional	40 unit	110.000.000,00
21	8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tenggarong, Panji	43 unit	40.000.000,00	APBD II		43 unit	50.000.000,00
22	8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tenggarong, Panji	2 unit	50.000.000,00	APBD II		2 unit	50.000.000,00
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan		2,17%	6.050.000.000,00	APBD II		2,34%	650.000.000,00

	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		12 dokumen	6.050.000.000,00	APBD II		12 dokumen	650.000.000,00
23	8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20 kecamatan	1.800 orang	5.550.000.000,00	APBD II	Fasilitasi Kegiatan Paskibraka, Fasilitasi FPK, JPM dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Pemuda Pemudi Lintas Suku	500 orang	400.000.000,00
24	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10 kecamatan (loa kulu, sanga sanga, ma. Jawa, ma. Badak, kota bangun darat, ma. Wis, sebulu, kenohan, samboja barat dan tabang)	600 orang	500.000.000,00	APBD II	Kegiatan Pembentukan Kader Bela Negara di 20 kecamatan dan pembinaan karakter kebangsaan	300 orang	250.000.000,00

	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah		14,51%	4.331.992.000,00	APBD II		14,75%	1.802.894.600,00
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri		12 dokumen	4.331.992.000,00	APBD II		12 dokumen	1.802.894.600,00
25	8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 kecamatan	2.000 orang	500.000.000,00	APBD II	Penambahan untuk kegiatan pendidikan politik bagi pemilih pemula, perempuan, komunitas, ormas, aparatur desa/kelurahan dan RT	460 orang	250.000.000,00

26	8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	48 orang	3.581.992.000,00	APBD II	Fasilitasi kenaikan nilai per suara Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik hasil pemilu Tahun 2024	48 orang	1.402.894.600,00
27	8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 kecamatan	24 laporan	250.000.000,00	APBD II	Monitoring pemantauan dan perkembangan politik di daerah	24 laporan	150.000.000,00
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang tertib administrasi		12,90%	700.000.000,00	APBD II		14,40%	200.000.000,00
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		30 dokumen	700.000.000,00	APBD II		30 dokumen	200.000.000,00

28	8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20 kecamatan	840 orang	700.000.000,00	APBD II	Fasilitasi dan Pengawasan Ormas, serta Sosialisasi terhadap Ormas dan pelaksanaan ormas award dan koordinasi di ULA Kemendagri terkait SKT Ormas	90 orang	200.000.000,00
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud		1,45%	1.202.429.000,00	APBD II		1,58%	630.000.000,00
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		5 dokumen	1.202.429.000,00	APBD II		5 dokumen	630.000.000,00
29	8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 kecamatan	1.800 orang	902.429.000,00	APBD II	Fasilitasi FKUB, BNNK, Kemah Pemuda Pemudi Lintas Agama, pelaksanaan assesment pengguna narkotika dan	600 orang	500.000.000,00

								pembelian tes kit narkoba		
30	8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 kecamatan	35 laporan	300.000.000,00	APBD II	Fasilitasi Ketahanan Ekonomi untuk sosialisasi pekat di bidang ketahanan ekonomi	18 Laporan	130.000.000,00
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti		100%	2.200.000.000,00	APBD II		100%	1.900.000.000,00
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		12 dokumen	2.200.000.000,00	APBD II		12 dokumen	1.900.000.000,00
31	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 kecamatan	1.000 orang	700.000.000,00	APBD II	Fasilitasi FKDM, Monitoring TKA, Sosialisasi Radikalisme, Deteksi Dini	300 orang	400.000.000,00

32	8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	20 kecamatan	50 dokumen	1.500.000.000,00	APBD II	Fasilitasi Forkopimda dalam penanganan konflik dan gejolak masyarakat	50 dokumen	1.500.000.000,00
		JUMLAH				27.292.950.350,00				15.240.989.808,00

BAB V

P E N U T U P

A. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

Ada beberapa sasaran yang belum mengakomodir kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara secara menyeluruh untuk Tahun 2025. Hal ini bukan berarti sasaran tersebut tidak menjadi perhatian namun lebih fokus pada prioritas kegiatan sebagaimana tertera di atas untuk Tahun 2025, dalam rangka mensinergikan kegiatan sesuai dengan misi RPJMD 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun pertama pelaksanaan RPJMD. Sehingga sasaran yang belum direalisasikan dalam kegiatan 2024 secara bertahap akan dilaksanakan pada Tahun ke depan, sesuai dengan pagu dan posting anggaran yang tersedia.

Rancangan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD 2021-2026 telah memuat program beserta pagu indikatif OPD dan setelah dilakukan perbandingan dengan hasil analisis kebutuhan pada Badan Kesbangpol pada Tahun 2025 yang dilakukan sesuai prioritas Badan Kesbangpol sebagai berikut :

No	Prioritas OPD	Keterangan
1	Penguatan Forum-Forum Bentukan Pemerintah melalui Pemberdayaan Masyarakat	FPK, FKUB, FKDM DAN JPM
2	Penciptaan Iklim Demokratis dan Kondusif Pasca Pemilu dan Pemilukada Serentak Tahun 2024	Penguatan Pendidikan Politik ke seluruh lapisan aparatur dan Masyarakat Pengutan Deteksi Dini Kejadian Konflik Peningkatan besaran Bankeu Parpol
3	Pelaksanaan Tugas Paskibraka dan Purna Paskibraka	Pembentukan Duta Pancasila
4	Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Pencegahan Paham Radikalisme	Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi di seluruh kecamatan
5	Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi di seluruh kecamatan dan tes urine
6	Penguatan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Sosialisasi dan Pengawasan Ormas serta Ormas Award

B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2025 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2025 yang harus diperhatikan oleh para penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan, antara lain :

1. Seluruh penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan, utamanya program dan kegiatan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 tanpa terkecuali dengan tetap menjaga konsistensi, integrasi dan sinergitas.
2. Setiap penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Upaya pengendalian dan pengawasan ini akan merevisi setiap kekurangan serta mengakselerasi dan mengoptimalkan capaian positif kinerja perangkat daerah.
3. Kepala Badan, melalui Sekretaris, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap bidang secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2025
4. Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Tahun 2025. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara.

C. Rencana Tindak Lanjut

Meskipun demikian dari rencana program dan kegiatan tersebut diatas, terdapat perbedaan dengan rancangan RKPD, hal tersebut disebabkan sebagai berikut

1. Terdapat perbedaan pada satuan di renstra karena menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
2. Penambahan besaran dana pengelola keuangan Badan Kesbangpol
3. Penambahan Sub Kegiatan utk Pengadaan pakaian dinas harian dan pakaian dinas lapangan ASN Kesbangpol yang sudah rusak
4. Penambahan untuk biaya kontribusi mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Kesbangpol
5. Penambahan untuk kegiatan pameran dan pawai Pembangunan
6. Penambahan biaya cetak NCR
7. Penambahan utk keperluan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
8. Penambahan utk peralatan elektronik dan kebutuhan PPID
9. Penambahan untuk pembiayaan rumah sekretariat BNNK dan Forum
10. Penambahan utk kenaikan BPJS dan penyediaan jasa tenaga kebersihan
11. Penambahan untuk sewa kendaraan dinas operasional
12. Fasilitasi Kegiatan Paskibraka, Fasilitasi FPK, JPM dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Pemuda Pemudi Lintas Suku
13. Kegiatan Pembentukan Kader Bela Negara di 20 kecamatan dan pembinaan karakter kebangsaan
14. Penambahan untuk kegiatan pendidikan politik bagi pemilih pemula, perempuan, komunitas, ormas, aparatur desa/kelurahan dan RT
15. Fasilitasi kenaikan nilai per suara Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik hasil pemilu Tahun 2024
16. Monitoring pemantauan dan perkembangan politik di daerah
17. Fasilitasi dan Pengawasan Ormas, serta Sosialisasi terhadap Ormas dan pelaksanaan ormas award dan koordinasi di ULA Kemendagri terkait SKT Ormas
18. Fasilitasi FKUB, BNNK, Kemah Pemuda Pemudi Lintas Agama, pelaksanaan assesment pengguna narkotika dan pembelian tes kit narkoba

19. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi untuk sosialisasi pekat di bidang ketahanan ekonomi
20. Fasilitasi FKDM, Monitoring TKA, Sosialisasi Radikalisme, Deteksi Dini

untuk menyikapi hal tersebut, Badan Kesbangpol telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian terhadap kegiatan generik, baik dalam penyesuaian target kinerja hingga penundaan kegiatan.
2. Melakukan penentuan kegiatan prioritas dengan memberikan peringkat terhadap kegiatan yang dianggap sangat prioritas
3. Adapun sub kegiatan yang dianggap sangat prioritas dapat diurut sebagai berikut :
    a) Prioritas 1
        1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
        2) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
        3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
        4) Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
        5) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

6) Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
7) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

b) Prioritas 2
1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Usuluan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara, disusun berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan pada bidang-bidang teknis. Penyempurnaan matrik Renja bertujuan untuk mewujudkan alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan Tahunan beserta indikator kinerjanya. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan rencana kinerja Tahunan adalah *target setting* dari capaian indikator kinerja.

Langkah atau kegiatan utama penyusunan Renja OPD meliputi : 1) Merumuskan kegiatan, 2) Merumuskan indikator kegiatan, 3) menetapkan target setiap indikator kegiatan dengan memperhatikan capaian kinerja Tahun sebelumnya.

Penilaian pencapaian target kinerja kegiatan akan dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana ketentuan perundang-

undangan yang belaku. Kerangka monitoring dan evaluasi kegiatan akan dikembangkan berdasarkan indikator dan target kinerja.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini disampaikan, sebagai acuan dan dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan serta sebagai alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan, efesiensi belanja dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

c.RENJA BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) Tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) Tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) Tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan Strategis Lima Tahunan kedalam perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu penyusunan Renja Bappeda dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappeda, evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun-Tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappeda.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 mendasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

Renja Bappeda adalah dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) Tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dilingkup Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Tujuan:

Penyusunan Renja Bappeda bertujuan:

a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan Tahunan Bappeda Tahun 2025
b. Menyediakan sarana pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah maka sistematika penyusunan Rancangan Awal RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN,
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU,
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran OPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Program dan Kegiatan.
BAB V PENUTUP.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Berdasarkan Dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Bappeda mendukung pencapaian sasaran daerah **“** Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani **”**. Hal ini terkait dengan tugas dan fungsi BAPPEDA sebagai Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 secara umum selaras dengan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2023, demikian juga untuk Tahun berjalan yaitu Tahun 2023, namun terdapat beberapa Program Kegiatan yang capaiannya kurang maksimal. Adapun Evaluasi terhadap Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2023 sebagai Berikut :

1) Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
   I. Sampai pada Tahun 2023, Program yang tidak memenuhi target kinerja adalah program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan indikator Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD, Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD, Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD, capaian kinerja Tahun 2023 adalah 93,21 % dengan target kinerja 100 % .
2) Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub KegiatanPenyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (100%);
b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (100%);
c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (100%);
d. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100%).

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (100%);
b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (100%);dan
c. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran(100%).

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (100%);
b. Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD(100%);
c. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD(100%);dan
d. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD(100%);

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya (100%);
b. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian(100%);
c. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai(100%);dan

d. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan(100%).

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor(100%);
b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor(100%)
c. Sub KegiatanPenyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan(1001%);
d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan(100%);
e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material(100%);
f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(100%);
g. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(100%);dan
h. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD(100%).

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas(100%).
b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel(100%);dan
c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya(100%).

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik(100%).
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor(100%).

Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (100%);

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan(100%);
c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya(100%);dan
d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya(100%).

III. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

a. Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah(100%);
b. Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya(100%);
c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik(100%);
d. Sub KegiatanKoordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD(100%);
e. Sub KegiatanPelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota(100%);
f. Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan(100%);dan
g. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota(100%).

Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah(100%);
b. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD(100%);dan
c. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota(100%).

Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota(100%).
b. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah(100%).

IV. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (100%);
b. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan(100%);
c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan(100%);
d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan(100%);
e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (100%);
f. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia(100%);
g. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia(100%);dan

h. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia(100%).

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(100%);
b. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian(100%);
c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian(100%);
d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian(100%);
e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(100%);
f. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA(100%);
g. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA(100%);dan
h. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA(100%).

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (100%);
b. Sub kegaiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (100%);

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur(100%);
d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (100%);
e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (100%);
f. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan(100%);
g. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan(100%);dan
h. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan(100%).

3) Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Sampai pada Tahun 2023, Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan pada Sasaran Daerah, capaian kinerja sampai Tahun 2023 sebesar 103,80 % dengan target kinerja sebesar 100 %.
b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah, Jumlah Pendampingan Ketersediaan Data, Jumlah Layanan Data dan Informasi Kecamatan, Jumlah Rancangan Regulasi Daerah, Jumlah Personil Pembinaan Data, capaian kinerja sampai Tahun 2023 sebesar 250 % dengan target kinerja 100 %.

4) Adapun Faktor – Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan antara lain :
   a) Pemahaman tentang Pentingnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada perangkat daerah masih rendah;
   b) Belum seluruh Perangkat daerah memiliki kapasitas yang memadai dalam menyusun dokumen perencanaan;
   c) Fungsi dan Peran BAPPEDA belum optimal dalam melakukan pendampingan terhadap perangkat daerah pada tahapan perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
   d) Implementasi pelaksanaan perencanaan yang tidak tepat sasaran;
   e) Masih rendahnya kesadaran dari perangkat daerah dalam pemanfaatan aplikasi e-pantau dalam rangka peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi sebagai bahan pendukung penyusunan rekomendasi kebijakan;
   f) Ketersediaan data yang belum akurat oleh beberapa PD sehingga kesulitan melakukan proyeksi dalam penyusunan rencana kerja;
   g) Lemahnya koordinasi antar bidang perencanaan;dan
   h) Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.
5) Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

   Diharapkan hasil dari pelaksanaan program kegiatan dan aktivitas yang telah dilakukan membawa implikasi positif pada pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6) Kebijakan / tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut:
   a) Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi capaian kinerja secara rutin dan berkala (minimal 3 bulan sekali) dalam rangka meningkatkan capaian target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.
   b) Melakukan terobosan dengan menciptakan perencanaan yang inovatif untuk menumbuhkan kreativitas aparatur

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

c) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur perencanaan yang adaptif terhadap kemajuan teknologi dan informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek,pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

d) Penguatan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan aktivitas kinerja.

e) Tetap Konsisten mengawal ketercapaian program/kegiatan melalui evaluasi dokumen perencanaan, pengendalian kegiatan dan SPIP.

TABEL TC 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7=9)	11=(10/4)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah								
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13	13	100			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26	7	6	6	100,00		13	50,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20	8	4	4	100,00		12	60,00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7=9)	11=(10/4)
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	2	2	2	100,00		4	40,00
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	5	1	1	1	100,00		2	40,00
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			6	6	100			
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.340	1668	1668	1668	100,00		3336	40,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	25	5	5	5	100,00		10	40,00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7=9)	11=(10/4)
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	1	1	1	100,00		2	40,00
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			6	6	100			
8	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	0	1	1	100,00		1	20,00
9	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5	0	1	1	100,00		1	20,00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7=9)	11=(10/4)
10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	0	1	1	100,00		1	20,00
11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15	3	3	3	100,00		6	40,00
I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			8	8	100			
		Jumlah Pakaian			3	3	100			
		Jumlah ASN			60	60	100			
12	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	7	1	3	3	100,00		4	57,14
13	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Juumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20	4	4	4	100,00		8	40,00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7=9)	11=(10/4)
14	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20	5	4	4	100,00		9	45,00
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300	30	60	60	100,00		90	30,00
I.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			8	8	100			
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	1	2	2	100		3	60,00
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis bahan logistik Kantor yang disediakan	15	3	3	3	100,00		6	40,00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7=9)	11=(10/4)
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	2	2	2	100,00		4	40,00
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15	3	4	4	100,00		7	46,67
20	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10	2	2	2	100,00		4	40,00
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	795	150	150	150	100,00		300	37,74
22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15	5	5	5	100,00		10	66,67

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7=9)	11=(10/4)
23	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	1	1	1	100,00		2	40,00
I.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah			100	100	100			
24	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang disediakan			5	5	100,00			
25	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2	0	2	2	100,00		2	100,00
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	78	18	148	148	100,00		166	212,82
I.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			12	12	100			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7=9)	11=(10/4)
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100,00		24	40,00
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100,00		24	40,00
I.8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah			100	100	100			
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	105	21	21	21	100,00		42	40,00
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	140	28	28	28	100,00		56	40,00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7=9)	11=(10/4)
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	180	38	27	27	100,00		65	36,11
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	660	132	12	12	100,00		144	21,82
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah			100	103,8	103,8			
II.9	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			6	6	100			
		Jumlah Pendampingan perencanaan			58	58	100			
		Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik			2	2	100			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7=9)	11=(10/4)
		Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			25	25	100			
		Jumlah pelaksanaan Musrenbang			1	1	100			
33	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	5	1	2	2	100,00		3	60,00
34	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5	1	2	2	100,00		3	60,00
35	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5	1	2	2	100,00		3	60,00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7=9)	11=(10/4)
36	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	15	1	25	25	100,00		26	173,33
37	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	6	1	1	1	100,00		2	33,33
38	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	90	18	18	18	100,00		36	40,00
39	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	20	2	2	2	100,00		4	20,00
II.10	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah			5	5	100			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7=9)	11=(10/4)
		Jumlah pendampingan ketersediaan data			32	32	100			
		Jumlah layanan data dan informasi kecamatan			1	7	700			
		Jumlah Rancangan Regulasi Daerah			0	0	0			
		Jumlah Personil Pembinaan Data			56	56	100			
40	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	15	3	3	3	100,00		6	40,00
41	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	150	30	56	56	100,00		86	57,33

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7=9)	11=(10/4)
42	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	5	1	2	2	100,00		2	40,00
II.11	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			6	6	100			
43	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	40	8	2	2	100,00		10	25,00
44	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	4	0	0	0	-	kegiatan evaluasi kerjasama dilaksanakan dibagian kerjasama (setkab)	0	-

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7=9)	11=(10/4)
45	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	20	4	4	4	100,00		8	40,00
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD			100	96,24	96,24			
		Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD			100	87,75	87,75			
		Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD			100	95,63	95,63			
III.12	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			74	74	100			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7=9)	11=(10/4)
46	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55	11	11	11	100,00		22	40,00
47	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	55	11	11	11	100,00		22	40,00
48	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	55	11	11	11	100,00		22	40,00
49	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	5	1	1	1	100,00		2	40,00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7=9)	11=(10/4)
50	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	60	12	12	12	100,00		24	40,00
51	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	60	12	12	12	100,00		24	40,00
52	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	60	12	12	12	100,00		24	40,00
53	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5	3	4	4	100,00		7	140,00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7=9)	11=(10/4)
III.13	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			38	38	100			
54	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	30	6	6	6	100,00		12	40,00
55	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	30	6	6	6	100,00		12	40,00
56	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	30	0	6	6	100,00		6	20,00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7=9)	11=(10/4)
57	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5	1	2	2	100,00		3	60,00
58	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	25	5	5	5	100,00		10	40,00
59	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	25	5	5	5	100,00		10	40,00
60	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	25	5	7	7	100,00		10	40,00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7=9)	11=(10/4)
61	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	5	2	1	1	100,00		3	60,00
III.14	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			71	71	100			
62	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	20	4	4	4	100,00		8	40,00
63	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	20	4	4	4	100,00		8	40,00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7=9)	11=(10/4)
64	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	20	4	4	4	100,00		8	40,00
65	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5	3	3	3	100,00		6	120,00
66	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	90	18	18	18	100,00		36	40,00
67	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	90	18	18	18	100,00		36	40,00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja-PD) Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7=9)	11=(10/4)
68	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	90	18	18	18	100,00		36	40,00
69	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5	2	2	2	100,00		4	80,00

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam menentukan skala penilaian kinerja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berikut capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2023 berdasarkan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dijelaskan pada tabel berikut :

TABEL TC 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kutai Kartanegara

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
1	Score Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah		Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan perangkat daerah masuk ke urusan penunjang dan tidak termasuk perangkat daerah urusan pemerintah jadi dari IKK yang sudah ditetapkan di Permendagri tersebut belum ada	1	2,20 (1)	2,30 (1)	2,40 (1)	2,50 (1)	1	2,07 (1)	7,01 (2)	2,40 (1)	2,40 (1)	Capaian kinerja pada Tahun 2023 melebihi sesuai dengan target kinerja
2	Rata-rata capaian indikator sasaran daerah			90	94.00	95.00	96.00	96.50	87,2	94,2	96,09	96.00	96.50	Capaian kinerja pada Tahun 2023 melebihi sesuai dengan target kinerja
3	Nilai Sakip Perangkat Daerah			82	87	88	88,5	88.85	93,51	91,2	0	88,5	88.85	Belum dikeluarkan oleh Inspektorat
4	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah			n.a	100	100	100	100	n.a	93,29	103,8	100	100	Capaian kinerja pada Tahun 2023 melebihi sesuai dengan target kinerja

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
5	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD			n.a	100	100	100	100	n.a	94,96	96,24	100	100	Persentase Capaian Kinerja Baik
6	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD			n.a	100	100	100	100	n.a	90,02	87,75	100	100	Persentase Capaian Kinerja Baik
7	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD			n.a	100	100	100	100	n.a	99,05	95,63	100	100	Persentase Capaian Kinerja Baik

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
8	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			n.a	12	12	12	12	n.a	12	12	14	14	Capaian kinerja pada Tahun 2023 sesuai dengan target kinerja
9	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			n.a	6	6	6	6	n.a	6	6	6	6	Capaian kinerja pada Tahun 2023 sesuai dengan target kinerja
10	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik			n.a	6	6	6	6	n.a	6	6	6	6	Capaian kinerja pada Tahun 2023 sesuai dengan target kinerja
11	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			n.a	8	8	8	8	n.a	8	8	8	8	Capaian kinerja pada Tahun 2023 sesuai dengan target kinerja
12	Jumlah Pakaian			n.a	145			145	n.a	141	3		145	Penyesuaian terhadap Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
13	Jumlah ASN			n.a	60	60	60	60	n.a	60	60	60	60	Capaian kinerja pada Tahun 2023 sesuai dengan target kinerja
14	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				9	9	9	9	n.a	8	8	8	9	Capaian kinerja pada Tahun 2023 sesuai dengan target kinerja
15	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah				100	100	100	100	n.a	100	100	100	100	Capaian kinerja pada Tahun 2023 sesuai dengan target kinerja
16	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan				12	12	12	100	n.a	12	12	12	12	Capaian kinerja pada Tahun 2023 sesuai dengan target kinerja
17	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah				100	100	100	100	n.a	100	100	100	100	Capaian kinerja pada Tahun 2023 sesuai dengan target kinerja

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
18	Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				24	24	24	24	n.a	24	6	24	24	Penyesuaian terhadap peraturan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
19	Jumlah Pendampingan perencanaan				58	58	58	58	n.a	58	58	58	58	Capaian kinerja pada Tahun 2023 sesuai dengan target kinerja
20	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik				2	2	2	2	n.a	2	2	2	2	Capaian kinerja pada Tahun 2023 sesuai dengan target kinerja
21	Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				3	3	3	3	n.a	3	25	3	3	Penyesuaian terhadap peraturan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
														dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
22	Jumlah pelaksanaan Musrenbang				2	2	2	2	n.a	1	1	2	2	Capaian kinerja pada Tahun 2023 sesuai dengan target kinerja
23	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				5	5	5	5	n.a	5	5	5	5	Capaian kinerja pada Tahun 2023 sesuai dengan target kinerja
24	Jumlah pendampingan ketersediaan data				32	32	32	32	n.a	32	32	32	32	Capaian kinerja pada Tahun 2023 sesuai dengan target kinerja

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
25	Jumlah layanan data dan informasi kecamatan				1	1	1	1	n.a	1	7	1	1	Capaian kinerja pada Tahun 2023 melebihi dengan target kinerja
26	Jumlah Rancangan Regulasi Daerah				1				n.a	1				
27	Jumlah Personil Pembinaan Data				30	30	30	30	n.a	30	56	30	30	Capaian kinerja pada Tahun 2023 melebihi dengan target kinerja
28	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				13	13	13	13	n.a	13	6	13	13	Persentase Capaian Kinerja Baik

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
29	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				75	75	75	75	n.a	75	74	75	75	Persentase Capaian Kinerja Baik
30	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				37	37	37	37	n.a	37	38	37	37	Capaian kinerja pada Tahun 2023 melebihi dengan target

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
31	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				70	70	70	70	n.a	70	71	70	70	Capaian kinerja pada Tahun 2023 melebihi dengan target

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

   Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bappeda, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Secara umum kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja Tahun 2023 maupun Renstra Tahun 2021-2026 sudah cukup baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan terlampaui. Hanya ada beberapa target indikator yang belum tercapai, diantaranya adalah indikator " Persentase Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Pada Renja PD, Persentase Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Ekonomi dan SDA Pada Renja PD, Persentase Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah Pada Renja PD. Bappeda perlu melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam meningkatkan capaian tersebut, dimana hal ini berkaitan dengan peran Bappeda sebagai kordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

   Adapun Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, antara lain:

   a) Belum maksimalnya penyusunan dokumen perencanaan

      Hal ini disebabkan kurangnya ketelitian dan kecermatan dalam penyusunan dokumen, kurangnya data yang cukup memadai, dan kurang optimalnya koordinasi dengan perangkat daerah pengampu. Hal tersebut tentu berdampak pada dokumen perencanaan yang dihasilkan kurang berkualitas.

b) Belum optimalnya penyelenggaraan dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah berbasis analisis hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Hal ini antara lain disebabkan belum optimalnya pemahaman SDM perencana dalam proses perencanaan, penganggaran serta monitoring, evaluasi dan pengendalian. Hal ini dapat berpengaruh pencapaian prioritas pembangunan daerah. Upaya yang harus dilakukan Bappeda untuk menghadapi masalah ini adalah dengan meningkatkan kompetensi SDM dalam perencanaan, pengendalian & evaluasi perencanaan pembangunan daerah, perencanaan penganggaran pembangunan daerah, serta pencapaian Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dan target indikator masing-masing OPD dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu juga perlu dilakukan optimalisasi pendampingan dan fasilitasi perangkat daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran.

c) Terdapat perubahan regulasi dari pusat yang menyebabkan perlunya penyesuaian pada dokumen perencanaan, diantaranya adalah Diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja sub kegiatan termasuk pemutkhiran pada SIPD nya. Hal ini berpengaruh dalam penyusunan RKPD dan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024

d) Belum optimalnya ketersediaan serta updating data dan informasi terkait perencanaan pembangunan daerah

Hal ini antara lain disebabkan terdapat permasalahan saat proses pengumpulan data dari perangkat daerah, baik dalam hal kelengkapan maupun validitas data

3. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah,terhadap Capaian Program Nasional/Internasional seperti NSPK, SPM,SDGs

Dalam mengupayakan terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, secara umum Bappeda memiliki konstribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian kelima misi yang ditetapkan. Namun secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Bappeda mendukung pencapaian Misi pertama, yaitu “Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani”. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut terdapat 3 sasaran pembangunan yaitu (1) meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator sasaran Nilai SAKIP kabupaten. (2). Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator sasaran Indeks Persepsi Anti Korupsi. (3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indeks persepsi dengan indikator sasaran kualitas pelayanan publik. Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara mendukung sasaran 1 yaitu meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tabel 2.1

Faktor Penghambat dan Pendukung Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Terhadap Pencapaian Visi,Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Misi dan Sasaran RPJMD yang Terkait Dengan Peran Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
MISI-1 Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani	Belum Optimalnya Sinkronisasi Perencanaan Antara Pusat dan Daerah	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Nasional dan Provinsi (Forum Trilateral Desk)
Sasaran		
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dengan Indikator Sasaran Nilai Sakip Kabupaten		Dukungan Sistem Informasi Perencanaan dan Sistem Informasi Pengendalian

Misi dan Sasaran RPJMD yang Terkait Dengan Peran Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Integrasi Sistem Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
	Masih kurangnya komitmen dan konsistensi Instansi pelaksanaan atas perencanaan pembangunan	Semakin strategisnya peran perencanaan sebagai konsistensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
		Pemantauan Perencanaan Pembangunan Yang didukung Sistem(Epantau)
		Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Setiap Triwulan untuk mengendalikan dan memantau konsistensi Perangkat Daerah Terhadap Perencanaan Pembangunan
		Kerjasama Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Universitas/Instutusi Pendidikan Tinggi dalam mengawal perencanaan sebagai pendamping perangkat daerah
	Ketergantungan pada pihak diluar instansi perencana dalam penyediaan data capaian indikator kinerja pembangunan	Digitalisasi dan Kebijakan data (Satu Data) mendukung Sinkronisasi data statistik/Sektoral
	Masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan kinerja aparatur SDM Perencana, disebabkan manajemen ASN belum berdasar pada perbandingan antara kompetensi dan Kualifikasi	Kebijakan Peningkatan dan Pengutan Kapasitas SDM Bappeda

4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

a) Tantangan

Dalam rangka pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahahan Daerah, Bappeda sebagai perangkat daerah

yang membidangi perencanaan pembangunan daerah memberi pelayanan dalam proses perencanaan dengan wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pembinaan dibidang perencanaan.

Adapun tantangan yang dihadapi BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain:

1. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah cukup dinamis, yang menuntut sumber daya aparatur pada Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
2. Perencanaan dan penganggaran dengan “e-performance based budgeting”. Perencanaan dan penganggaran yang baik adalah yang menganut “e-performance based budgeting” sehingga sepenuhnya menerapkan money follow program dalam perencanaan anggarannya. Dengan demikian perangkat daerah tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran namun dapat memberikan hasil / dampak yang mampu memberikan perubahan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
3. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam, mengharuskan Bappeda bekerja lebih sistematis dan sinergis agar dokumen perencanaan yang dihasilkan tepat waktu, berkualitas. dan tepat sasaran
4. Penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi memerlukan kesamaan pemahaman oleh semua Perangkat Daerah

5. Dukungan Perangkat Daerah terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah belum optimal.
6. Data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya bisa digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses perencanaan.
7. Pengelolaan dan Penyajian data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan mutakhir.

b) Peluang

Peluang yang harus dioptimalkan oleh BAPPEDA dalam melaksanakan tugas dan fungsi antara lain :

1. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
2. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
3. Tersedianya potensi sumber daya aparatur. Potensi sumber daya aparatur yang tersedia harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
4. Keterlibatan Bappeda dalam setiap penyusunan kebijakan di semua sektor

   Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan

pembangunan, hal ini tentunya memberikan peluang bagi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah lainnya.

5. Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Yang Strategis

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bappeda sebagai berikut :

a) Penyusunan dokumen perencanaan sesuai regulasi.

Penyusunan dokumen perencanaan disusun sesuai proses dan tahapan perencanaan, namun belum sepenuhnya sesuai. Hal ini antara lain disebabkan kurangnya ketelitian dan kecermatan dalam penyusunan dokumen, kurangnya data yang cukup memadai, dan kurang optimalnya koordinasi dengan perangkat daerah pengampu. Hal tersebut tentu berdampak pada dokumen perencanaan yang dihasilkan kurang berkualitas. Beberapa rencana pengendalian yang harus dilakukan antara lain yaitu:

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), khususnya yang berkaitan dengan bidang perencanaan
2. Menindaklanjuti hasil evaluasi dan review dokumen perencanaan
3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh pihak terkait lainnya termasuk antar bidang di Bappeda.

b) Pengoptimalan Penyediaan Data dan Informasi

Ketersediaan data dan informasi yang berkualitas memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Penyediaan data dan informasi ini dapat dilakukan dengan menghimpun, mengelola serta

mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sumber diantaranya data dan informasi hasil kajian, data dan informasi evaluasi hasil perencanaan.

c) Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Bappeda

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, dan juga kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan review terhadap rancangan RKPD dan melakukan analisis kebutuhan dan ditemukan ada beberapa yang harus dirubah atau ditambah baik target maupun pagu anggaran dikarenakan beberapa hal, antara lain :

1. Adanya penyesuaian indikator, target, satuan dan output sub kegiatan;
2. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Renstra Bappeda;
3. Penambahan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka Dalam rangka mendukung pengelolaan dan penyediaan data statistik sektoral daerah serta Dalam rangka memastikan penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahunan yang dikelola dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah;
4. Penyesuaiaan target jumlah ASN pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

5. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dalam rangka penyediaan peralatan pendukung arsip, pendampingan pengelolaan arsip;
6. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dalam rangka Penyediaan Tim IT dan Pengelola Website, Peliputan dan Pembuatan Video Kegiatan;
7. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dalam rangka Pengadaan Video Wall Auditorium Lt. 1;
8. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dalam rangka Penambahan Belanja Pembayaran Listrik;
9. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dalam rangka Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi, tambahan untuk tenaga outscorcing keamanan dan resepsionis, tenaga kebersihan, tenaga teknis operasional kantor lainnya;
10. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dalam rangka pemeliharaan bangunan dan ruangan gedung kantor, pergantian dan modernisasi 2 unit sangkar lift , pemeliharaan ruamah dinas jabatan, pemeliharaan taman dan halaman gedung kantor, renovasi ruangan kantin, pembuatan kanopi, pemasangan paving blok;
11. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam rangka pemeliharaan sarana dan Prasarana gedung kantor (pemeliharaan listrik, Travo,Genset,AC,Jaringan Air,Internet,Sound sistem,PABX, CCTV, Videotron, videowall);
12. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD (rancangan Renja 2026) dan Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD (Rancangan Renstra PD 2025-2029);

13. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Dokumen RKPD 2026, Dokumen P RKPD 2025, Dokumen RPJMD 2025-2029;
14. Efisiensi anggaran pada Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka penyusunan laporan Analisis Data sektoral, Laporan Analisis Data Spasial, Pelaporan intervensi program RBPK Tahun 2024;
15. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD dalam rangka pendampingan dan pemanfaatan data sektoral dan spasial;
16. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan dokumen Profil Pembangunan Daerah dan Pembuatan Video Pembangunan Daerah;
17. Efisiensi anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD Semester I dan penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD semester II;
18. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah tidak dilaksanakan karena dikarenakan setelah berkoordinasi dengan Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah ternyata Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah sudah melakukan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama sehingga dalam rangka efektif dan efisien kegiatan yang dimaksud dilaksanakan pada Perangkat Daerah Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah;
19. Penambahan anggaran Pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam rangka penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja RKPD/APBD Triwulan I,II,III dan IV serta penyusunan dokumen evaluasi RPJMD Periode 2021 – 2026;

20. Penambahan anggaran pada Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dalam rangka pendampingan yang lebih intensif terhadap Perangkat daerah dalam Penyusunan Renstra, Renja, Rakor Tematik Bidang Pemerintahan dan forum lintas PD;
21. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dalam rangka penyusunan laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan yang berkerjasama dengan Tim Ahli dalam proses asistensi Renstra PD dan Renja PD;
22. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Dalam rangka melakukan evaluasi pengendalian pada PD melalui Indikator Kinerja (evaluasi tematik program prioritas Pemerintahan Desa, IDM (indeks Desa Membangun) , BumDesa,) dan Penyediaan data sektoral dan pelaksanaan kegiatan monev sesuai pemetaan pada aksi bangda percepatan penurunan stunting dan penyediaan data sektoral;
23. Penambahan anggara pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Dalam rangka Penyusunan dokumen RAD SDGs dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan sarana peribadatan skala kabupaten;
24. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dalam rangka pendampingan yang lebih intensif terhadap Perangkat daerah dalam Penyusunan Renstra,Renja dan Rakor Tematik Bidang Pembangunan Manusia;
25. Penambahan anggaran Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dalam rangka kerjasama dengan tim Ahli

dari perguruan tinggi dalam proses Asistensi Renstra PD dan Renja PD;

26. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dalam rangka melakukan evaluasi pengendalian pada Perangkat daerah melalui Indikator Kinerja (evaluasi tematik program prioritas kemiskinan, pendidikan, kesehatan,Kabupaten Layak Anak, Gender) dan Penyediaan data sektoral;
27. Penambahan anggaran Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Dalam rangka Fasilitasi Kerjasama dengan Tim Ahli dari Perguruan Tinggi terkait penyusunan Dokumen Lanjutan Penaganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskianan, Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan pusat pendidikan; Pengembangan gedung olah raga kabupaten, Pengembangan kawasan pusaka/cagar budaya Kerajaan Kutai (pariwisata budaya dan ilmu pengetahuan), Pengembangan dan Pelestarian Kawasan Strategis Situs Muara Kaman , Pengembangan Kawasan Strategis Desa Adat dan Budaya Lekak Kidau, Kedang Ipil dan Sungai Bawang;
28. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dalam rangka penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah dan Rakor Tematik Bidang Perekonomian;
29. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dalam rangka Asistensi penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah;
30. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Dalam rangka melakukan evaluasi pengendalian pada Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja (evaluasi tematik program prioritas /

pariwisata, UMKM, IKM, Pusat Perdagangan) dan penyediaan data sektoral;

31. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi berbasis Wilayah di tiga Zona Pengembangan pusat perbelanjaan dan jasa/pasar (Lokus : Kecamatan Muara Badak,.Kemb.Janggut, Kota bangun, Loa Kulu), Pengembangan kawasan Industri dan Perdagangan (Lokus : Sanga-Sanga, Loa Janan, Marang Kayu), Pengembangan kawasan pariwisata Perkotaan skala regional (pariwisata buatan) Tenggarong;
32. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dalam rangka penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah dan Rakor Tematik Bidang SDA;
33. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dalam rangka Asistensi penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah;
34. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dalam rangka melakukan evaluasi pengendalian pada PD melalui Indikator Kinerja (evaluasi tematik program prioritas / Pertanian,Perkebunan,Perikanan, Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup) dan Penyediaan data sektoral);
35. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Dalam rangka tindak lanjut penyusunan Dokumen Perencanaan Desain Kawasan Sentra Padi Terintegrasi (FS,DED), Penyediaan dan perencanaan RTH publik perkotaan kecamatan (Lokus : Muara Badak Kembang Janggut ,Loa Kulu , Kota Bangun);

36. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dalam rangka penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah dan Rakor Tematik Bidang Infrastruktur, Koordinasi Penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA tentang infrastruktur berkelanjutan (narasumber : Kemenrerian PUPR, Kemendagri, Bappenas dan Akademisi);
37. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dalam rangka Asistensi penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah;
38. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dalam rangka melakukan evaluasi pengendalian pada PD melalui Indikator Kinerja (evaluasi tematik program prioritas Konektifitas antar kecamatan, Infrastruktur Kecamatan, Penyediaaan Air Bersih, Rumah Layak Huni, Sanitasi, dan Penyediaan Air Layak Minum,Relokasi Berdampak Bencana) dan Penyediaan data sektoral;
39. Penambahan anggaran pada Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dalam rangka penyusunan dokumen infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah berkaitan dengan isu strategis daerah : Pengembangan Kawasan Sebulu, Muara Kaman, Muara Bengkal
    a) Pengembangan Infrastruktur Jonggon penyamgga IKN;
    b) Penyusunan masterplan pembangunan pusat penelitian di Loa Kulu;dan
    c) Pengembangan kantor kantor pemerintahan dan swasta di Sanga Sanga dan Loa Janan.
40. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dalam rangka penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah dan Rakor tematik bidang kewilayahan;

41. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dalam rangka penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah;
42. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dalam rangka melakukan evaluasi pengendalian pada PD melalui Indikator Kinerja (evaluasi tematik program prioritas pengembangan infrastruktur kecamatan,) dan penyediaan data sektoral;dan
43. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan dalam rangka Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi Kabupaten Kutai Kartanegara dan Perlindungan kawasan badan air serta peningkatan kualitasnya seluruh kecamatan.

Tabel TC. 31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Tenggarong	Nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA	88,85 (AA)	Nilai / Peringkat	25.604.157.693	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Tenggarong	Nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA	88,85 (AA)	Nilai / Peringkat	35.640.841.398	
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	dokumen	500.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	dokumen	750.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dokumen	200.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dokumen	450.000.000	Penyesuaian Target serta Penambahan Pagu Dalam rangka penyusunan Renstra Bappeda
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	0	dokumen	0	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
									Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	dokumen	150.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	50.000.000	Dalam rangka fasilitasi penyusunan dokumen Epantau, LKJIP dan SPIP
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat	1	dokumen	100.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	1	Laporan	150.000.000	Dalam rangka fasilitasi penyusunan Laporan penyedian data sektoral
5	Penyelenggaraan Walidata Pendukung	Tenggarong					Penyelenggaraan Walidata Pendukung	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	1	dokumen	50.000.000	Dalam rangka mendukung pengelolaan dan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
	Statistik Sektoral Daerah						Statistik Sektoral Daerah		Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				penyediaan data statistik sektoral daerah
6	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong					Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1	Nberita Acara	50.000.000	Dalam rangka memastikan penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahunan yang dikelola dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	6	Laporan	17.752.943.365	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	6	Laporan	16.658.886.158	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	1.668	Orang/ Bulan	17.419.083.565	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.392	Orang/ Bulan	16.350.026.358	Menyesuaikan Jumlah ASN Bappeda
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Laporan	308.859.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	Laporan	308.859.800	Fasilitasi dalam rangka koordinasi dan penyusunan dokumen laporan keuangan,pajak,Laporan Bulanan Bendahara, SPD dan SP2D
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Laporan	25.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	dokumen	250.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	dokumen	150.000.000	
8	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen	50.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	dokumen	0	
9	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	50.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	50.000.000	Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pembinaan,pengawasan dan pengendalian BMD Perangkat Daerah Bappeda
10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Tenggarong	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada	1	Laporan	50.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Tenggarong	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan	0	Laporan	0	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
	Milik Daerah pada SKPD		SKPD yang di rekonsiliasi				Milik Daerah pada SKPD		Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				
11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	3	Laporan	100.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan	100.000.000	Fasilitasi dalam rangka penyusunan laporan penatausahaan BMD Perangkat daerah Bappeda
I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	5	dokumen	650.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	8	dokumen	625.000.000	
			Jumlah Pakaian	145	Stel				Jumlah Pakaian	116	Stel		
			Jumlah ASN	60	Orang				Jumlah ASN	60	Orang		
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong	Jumlah Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	145	stel	150.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong	Jumlah Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	116	orang	150.000.000	Penyesuaian Jumlah PNS Bappeda
12	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tenggarong	Juumlah laporan Data Pendataan Pegawai	4	dokumen	25.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tenggarong	Juumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	0	dokumen	0	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
									Administrasi Kepegawaian				
13	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tenggarong	JumlahLaporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	dokumen	75.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tenggarong	JumlahLaporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8	dokumen	75.000.000	Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Dokumen Pakta Integritas,Dokumen Perjanjian Kinerja Pegawai,Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Dokumen Indikator Kinerja Individu (IKI)
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah pesertai Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	orang	400.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	orang	400.000.000	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KUKAR BEBAYA, Rencana Bimtek yang akan dilaksanakan SIG Dasar, SIG

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
													Lanjutan, PBJ Tipe Dasar, C Dan B, Dalev, Operator SIG, Desain web dan Grafis, renstra,LKJIP,Probis, Desain thinking
I.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	Layanan	1.804.901.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	Layanan	2.513.361.800	
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	48	Jenis	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	200.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Bahan logistik	9	Jenis	450.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	450.000.000	Penyediaan Logistik, Makanan dan Minuman Rapat dan Makanan dan Minuman Tamu

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
			Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan	3.350	Kotak								
			Makanan dan Minuman Jamuan Tamu yang disediakan	2.090	Kotak								
17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Cetakan	950	Eksemplar	94.901.800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	94.901.800	Penyediaan Bahan cetakan dan Fotocopy
			Jumlah penggandaan	5.100	Lembar								
			Jumlah Cetakan Kalender	200	Buah								
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bacaanyang Disediakan	2.500	Dokumen	100.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	Dokumen	100.000.000	Penyediaan Majalah/Surat Kabar, Publikasi Surat Kabar, penyediaan buku perpustakaan
			Jumlah Kontrak Advetorial	2	Kali								

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
19	Penyediaan Bahan/Material	Tenggarong	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan	20	Jenis	45.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	Paket	45.000.000	Dalam rangka fasilitasi terkait even samboja,sangasanga,erau dan HUT RI
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	165	orang/ kali	750.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Laporan	750.000.000	Penyedian Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah
21	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah arsip pada unit pencipta dan pengolah arsip (UPPA) dan arsip pada unit kearsipan Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) dan Arsip pada unit	65	berkas	100.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	Dokumen	150.000.000	Dalam rangka penyediaan daftar arsip aktif perangkat daerah

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
			kearsipan (UK)										
22	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pearngkat Daerah	1	website	65.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	723.460.000	Penyediaan Tim IT dan Pengelola Website, Peliputan dan Pembuatan Video Kegiatan
I.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tenggarong	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	persen	476.461.240	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tenggarong	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	persen	6.837.145.800	
23	Pengadaan Mebel	Tenggarong	Jumlah Mebeliur yang adakan	5	Unit	228.961.240	Pengadaan Mebel	Tenggarong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	-	
24	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Peralatan gedung kantor	14	Unit	247.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Peralatan dan	1	Unit	6.837.145.800	Pengadaan Video Wall Auditorium Lt. 1

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
									Mesin Lainnya yang Disediakan				
I.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	2.272.313.550	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	4.080.948.540	
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	1.521.900.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	2.221.900.000	Penambahan Belanja Pembayaran Listrik
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	750.413.550	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.859.048.540	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi, tambahan untuk tenaga outscorcing keamanan dan resepsionis, tenaga

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
													kebersihan, tenaga teknis operasional kantor lainnya
			Jumlah Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12	Bulan								
I.8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tenggarong	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	100	persen	1.897.537.738	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tenggarong	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	100	persen	4.025.499.100	
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	15	Unit	239.429.620	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21	Unit	239.429.620	Penyediaan Pemeliharaan, Perawatan dan Perizinan kendaraan dinas perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan roda 2 dan roda 4

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	6									
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	25	Unit	233.002.620	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	Unit	233.002.620	Penyediaan Pemeliharaan, Perawatan dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapngan roda 2 dan roda 4
			Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	3									
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36	kali	705.676.838	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	2.500.000.000	Dalam rangka pemeliharaan bangunan dan ruangan gedung kantor, pergantian dan modernisasi 2 unit sangkar lift , pemeliharaan ruamah dinas

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
													jabatan, pemeliharaan taman dan halaman gedung kantor, renovasi ruangan kantin, pembuatan kanopi, pemasangan paving blok
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	132	kali	719.428.660	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	Unit	1.053.066.860	Dalam rangka pemeliharaan sarana dan Prasarana gedung kantor (pemeliharaan listrik, Travo,Genset,AC, Jaringan Air,Internet,Sound sistem,PABX, CCTV, Videotron, videowall)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tenggarong	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	100	Persen	4.212.400.000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tenggarong	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	100	Persen	4.430.000.000	
II.9	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tenggarong	Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	22	dokumen	2.125.000.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tenggarong	Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	6	dokumen	2.330.000.000	
			Jumlah Pendampingan perencanaan	58	Lembaga/OPD				Jumlah Pendampingan perencanaan	59	Lembaga/OPD		
			Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	2	Kali				Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	2	Kali		
			Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3	Forum				Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	72	Forum		
			Jumlah pelaksanaan Musrenbang	2	Kali				Jumlah pelaksanaan Musrenbang	2	Kali		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
32	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1	dokumen	600.000.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2	dokumen	600.000.000	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KUKAR BEBAYA, Dalam rangka penyusunan - Ranwal RKPD 2026 - Ranwal RPJMD 2025-2029
33	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Pendampingan Perencanaan	58	OPD	400.000.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Dokumen	400.000.000	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KUKAR BEBAYA, Dalm rangka penyusunan Dokumen Cetak Biru Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
			Jumlah Dokumen Integrasi TJSP	1	dokumen								
34	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Tenggarong	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	1	Kali	90.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Tenggarong	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	Berita Acara	90.000.000	- Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2026 - Konsultasi Publik Ranwal RPJMD 2025-2029
35	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Tenggarong	Jumlah Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	3	Forum	45.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	72	Berita Acara	100.000.000	- Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD (rancangan Renja 2026) - Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD (Rancangan Renstra PD 2025-2029)
36	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah Pelaksanaan	1	Kali	190.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah Berita Acara	2	Berita Acara	190.000.000	- Pelaksanaan Musrenbang RKPD 2026

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
			Musrenbang Kabupaten/Kota						Musrenbang Kabupaten/Kota				- Pelaksanaan Musrenbang RPJMD 2025-2029
37	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	18	dokumen	200.000.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tenggarong	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	20	Usulan	200.000.000	Pelaksanaan Musrenbang RKPD di 20 Kecamatan
38	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah Peraturan daerah dan peraturan bupati (RPJMD,RKPD dan Perubahan RKPD)	4	dokumen	600.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	3	Dokumen	750.000.000	- Dokumen RKPD 2026 - Dokumen P RKPD 2025 - Dokumen RPJMD 2025-2029
II.10	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	Tenggarong	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan	4	Masukan	1.034.900.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	Tenggarong	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan	3	Masukan	1.150.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
	Pembangunan Daerah		Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				Pembangunan Daerah		Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				
			Jumlah pendampingan ketersediaan data	32	urusan				Jumlah pendampingan ketersediaan data	32	urusan		
			Jumlah layanan data dan informasi kecamatan	1	layanan data dan informasi				Jumlah layanan data dan informasi kecamatan	1	layanan data dan informasi		
			Jumlah Rancangan Regulasi Daerah	1	Rancangan Regulasi				Jumlah Rancangan Regulasi Daerah	0	Rancangan Regulasi		
			Jumlah Personil Pembinaan Data	30	Orang				Jumlah Personil Pembinaan Data	177	Orang		
39	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen (Data Bidang Perencanaan)	3	dokumen	452.500.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tenggarong	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan	3	Masukan	400.000.000	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM DISAPA

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
									Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				(DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK) dan PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL IDAM Dalam rangka penyusunan laporan Analisis Data sektoral, Laporan Analisis Data Spasial, Pelaporan intervensi program RBPK Tahun 2024
			Jumlah Dokumen analisis data Kemiskinan	1	dokumen								
40	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan	Tenggarong	Jumlah Pendampingan ketersediaan data (32 Urusan)	32	urusan	480.000.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan	Tenggarong	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	177	Orang	500.000.000	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM DISAPA

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
	Pembangunan SKPD						Pembangunan SKPD						(DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK), Dalam rangka pendampingan dan pemanfaatan data sektoral dan spasial
			Jumlah layanan data dan informasi kecamatan	9	layanan data dan informasi								
			Jumlah Rancangan Regulasi Daerah	0	Rancangan Regulasi								
			Jumlah Personil Pembinaan Data	30	Orang								
41	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah dokumen Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1	dokumen	102.400.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2	Buku	250.000.000	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM DISAPA

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
													(DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK), Dalam rangka penyusunan dokumen Profil Pembangunan Daerah dan Pembuatan Video Pembangunan Daerah
II.11	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	13	dokumen	1.052.500.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	7	dokumen	950.000.000	
42	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Tenggarong	Jumlah dokumen Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8	dokumen	202.500.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2	Laporan	200.000.000	Dalam rangka penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD Semester I dan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
	Daerah di Kabupaten/Kota		Daerah di Kabupaten/Kota				Daerah di Kabupaten/Kota						penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD semester II
43	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	1	dokumen	150.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Tenggarong	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya		Kerja Sama	0	Kegiatan evaluasi kerjasama dilaksanakan dibagian kerjasama sekretariat daerah
44	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4	dokumen	700.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5	Laporan	750.000.000	Dalam rangka penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja RKPD/APBD Triwulan I,II,III dan IV serta penyusunan dokumen evaluasi

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
													RPJMD Periode 2021 - 2026
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tenggarong	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD	100	Persen	3.109.249.440	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tenggarong	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD	100	Persen	9.705.000.000	
			Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	100	Persen				Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	100	Persen		
			Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Bidang Sarana	100	Persen				Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Bidang Sarana	100	Persen		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
			dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD						dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD				
III.12	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	77	dokumen	1.176.750.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	81	dokumen	2.405.000.000	
45	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJPD,	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11	dokumen	115.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11	dokumen	230.000.000	Dalam rangka pendampingan yang lebih intensif terhadap Perangkat daerah dalam Penyusunan Renstra,Renja,Rakor Tematik Bidang

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
	RPJMD dan RKPD)												Pemerintahan dan forum lintas PD
46	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tenggarong	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11	dokumen	70.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pemerintahan	11	Laporan	200.000.000	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KUKAR BEBAYA, dalam rangka penyusunan laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan yang berkerjasama dengan Tim Ahli dalam proses

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
													asistensi Renstra PD dan Renja PD
			Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi	1	dokumen								
47	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11	dokumen	70.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tenggarong	Jumlah laporan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12	Laporan	245.000.000	Dalam rangka melakukan evaluasi pengendalian pada PD melalui Indikator Kinerja (evaluasi tematik program prioritas Pemerintahan Desa, IDM (indeks Desa Membangun) , BumDesa,) dan Penyediaan data sektoral dan pelaksanaan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
													kegiatan monev sesuai pemetaan pada aksi bangda percepatan penurunan stunting dan penyediaan data sektoral
48	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1	dokumen	250.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3	Laporan	380.000.000	Dalam rangka Penyusunan dokumen RAD SDGs dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan sarana peribadatan skala kabupaten
49	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	12	dokumen	236.750.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	13	dokumen	200.000.000	Dalam rangka pendampingan yang lebih intensif terhadap Perangkat daerah

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
	Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				dalam Penyusunan Renstra,Renja dan Rakor Tematik Bidang Pembangunan Manusia
50	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tenggarong	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12	dokumen	70.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia	13	Laporan	200.000.000	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KUKAR BEBAYA Dalam rangka kerjasama dengan tim Ahli dari perguruan tinggi dalam proses Asistensi Renstra PD dan Renja PD
			Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi	1	dokumen								

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
51	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12	dokumen	115.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tenggarong	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembanguna Manusia	13	Laporan	200.000.000	Dalam rangka melakukan evaluasi pengendalian pada Perangkat daerah melalui Indikator Kinerja (evaluasi tematik program prioritas kemiskinan, pendidikan, kesehatan,Kabupaten Layak Anak, Gender) dan Penyediaan data sektoral

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
52	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	dokumen	250.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	6	Laporan	750.000.000	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL IDAMAN Dalam rangka Fasilitasi Kerjasama dengan Tim Ahli dari Perguruan Tinggi terkait penyusunan Dokumen Lanjutan Penaganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskianan, Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan pusat pendidikan; Pengembangan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
													gedung olah raga kabupaten, Pengembangan kawasan pusaka/cagar budaya Kerajaan Kutai (pariwisata budaya dan ilmu pengetahuan), Pengembangan dan Pelestarian Kawasan Strategis Situs Muara Kaman , Pengembangan Kawasan Strategis Desa Adat dan Budaya Lekak Kidau, Kedang Ipil dan Sungai Bawang
			Jumlah Dokumen Pendukung Kebijakan Kemiskinan	2	dokumen								

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
III.13	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tenggarong	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	35	dokumen	977.500.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tenggarong	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	38	dokumen	3.500.000.000	
53	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	dokumen	67.500.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6	dokumen	300.000.000	Dalam rangka penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah dan Rakor Tematik Bidang Perekonomian
54	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tenggarong	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	6	dokumen	92.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang	6	Laporan	250.000.000	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KUKAR BEBAYA dalam rangka Asistensi penyusunan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
			Bidang Perekonomian						Pembangunan Perekonomian				Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah
			Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi	1	dokumen								
55	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6	dokumen	200.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tenggarong	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6	Laporan	300.000.000	Dalam rangka melakukan evaluasi pengendalian pada Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja (evaluasi tematik program prioritas / pariwisata, UMKM, IKM, Pusat Perdagangan) dan penyediaan data sektoral

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
56	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1	dokumen	90.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3	Laporan	900.000.000	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi berbasis Wilayah di tiga Zona Pengembangan pusat perbelanjaan dan jasa/pasar (Lokus : Kecamatan Muara Badak,.Kemb.Janggut, Kota bangun, Loa Kulu) 2. Pengembangan kawasan Industri dan Perdagangan (Lokus : Sanga-Sanga, Loa Janan, Marang Kayu) 3. Pengembangan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
													kawasan pariwisata Perkotaan skala regional (pariwisata buatan) Tenggarong
57	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	dokumen	90.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5	Dokumen	300.000.000	Dalam rangka penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah dan Rakor Tematik Bidang SDA
58	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	5	dokumen	92.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan	5	Laporan	250.000.000	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KUKAR BEBAYA (Kordinasi dilaksanakan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
			Perangkat Daerah Bidang SDA						Perangkat daerah Bidang SDA				dalam rangka Asistensi penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah
			Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi	1	dokumen								
59	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5	dokumen	255.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tenggarong	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5	Laporan	300.000.000	Dalam rangka melakukan evaluasi pengendalian pada PD melalui Indikator Kinerja (evaluasi tematik program prioritas / Pertanian,Perkebunan,Perikanan, Ketahanan Pangan, Lingkungan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
													Hidup) dan Penyediaan data sektoral
60	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1	dokumen	90.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2	Laporan	900.000.000	Dalam rangka : 1. Tindak lanjut penyusunan Dokumen Perencanaan Desain Kawasan Sentra Padi Terintegrasi (FS,DED) 2. Penyediaan dan perencanaan RTH publik perkotaan kecamatan (Lokus : Muara Badak Kembang Janggut ,Loa Kulu , Kota Bangun
III.14	Koordinasi Perencanaan	Tenggarong	Jumlah dokumen perencanaan	71	dokumen	954.999.440	Koordinasi Perencanaan	Tenggarong	Jumlah dokumen perencanaan	71	dokumen	3.800.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
61	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	dokumen	45.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4	dokumen	450.000.000	dalam rangka penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah dan Rakor Tematik Bidang Infrastruktur, Koordinasi Penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA tentang infrastruktur berkelanjutan (narasumber : Kemenrerian PUPR, Kemendagri, Bappenas dan Akademisi)

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
62	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tenggarong	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5	dokumen	92.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Infrastruktur	4	Laporan	250.000.000	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KUKAR BEBAYA, dalam rangka Asistensi penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah
			Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi	1	dokumen								
63	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	5	dokumen	249.999.620	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	4	Laporan	300.000.000	Dalam rangka melakukan evaluasi pengendalian pada PD melalui Indikator Kinerja (evaluasi tematik program prioritas Konektifitas antar

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
	Bidang Infrastruktur		Bidang Infrastruktur				Bidang Infrastruktur		Daerah Bidang Infrastruktur				kecamatan, Infrastruktur Kecamatan, Penyediaaan Air Bersih, Rumah Layak Huni, Sanitasi, dan Penyediaan Air Layak Minum,Relokasi Berdampak Bencana) dan Penyediaan data sektoral
64	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1	dokumen	90.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3	Laporan	1.200.000.000	dalam rangka penyusunan dokumen infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah berkaitan dengan isu strategis daerah : - Pengembangan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
													Kawasan Sebulu, Muara Kaman, Muara Bengkal - Pengembangan Infrastruktur Jonggon penyamgga IKN - . Penyusunan masterplan pembangunan pusat penelitian di loakulu - Pengembangan kantorkantor pemerintahan dan swasta di sanga sanga, loa janan
65	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	18	dokumen	45.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya	20	dokumen	250.000.000	Dalam rangka penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah dan Rakor tematik bidang kewilayahan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)		(RPJPD, RPJMD dan RKPD)				(RPJPD, RPJMD dan RKPD)		(RPJPD. RPJMD dan RKPD)				
66	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	18	dokumen	92.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Kewilayahan	20	Laporan	250.000.000	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KUKAR BEBAYA Asistensi dilaksanakan dalam rangka penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah
			Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi	1	dokumen								
67	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	18	dokumen	249.999.820	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Tenggarong	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan	20	Laporan	300.000.000	Dalam rangka melakukan evaluasi pengendalian pada PD melalui

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				Indikator Kinerja (evaluasi tematik program prioritas pengembangan infrastruktur kecamatan,) dan penyediaan data sektoral
68	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1	dokumen	90.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2	Laporan	800.000.000	Dalam rangka : - Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi kab.Kukar - Perlindungan kawasan badan air serta peningkatan kualitasnya seluruh kecamatan
Total Pagu Indikatif						32.925.807.133	Total Pagu Indikatif					49.775.841.398	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan Tahun yang direncakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Untuk Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara belum ada usulan dari Pemangku Kepentingan.

Tabel T-C 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, tema yang diangkat yaitu ***" Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan "*** dengan fokus Pembangunan Nasional yang dijabarkan melalui Prioritas Nasional RKP Tahun 2025 sebagai berikut:

1. PRIORITAS NASIONAL 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. PRIORITAS NASIONAL 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3. PRIORITAS NASIONAL 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industrii Kreatif serta mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4. PRIORITAS NASIONAL 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas
5. PRIORITAS NASIONAL 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

6. PRIORITAS NASIONAL 6 Membangun dar Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan
7. PRIORITAS NASIONAL 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
8. PRIORITAS NASIONAL 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang adil dan Makmur

Untuk Target pembangunan yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi dengan target sebesar 5,3 - 5,6 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target sebesar 4,5 - 5,0 %
3. Tingkat Kemiskinan dengan target sebesar 7,0 - 8,0 %
4. Nilai Tukar Petani dengan target sebesar 113 - 115
5. Rasio Gini dengan target sebesar 0,379 - 0,382
6. Indeks Modal Manusia dengan target sebesar 0,56
7. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca dengan target sebesar 38,6 %
8. Nilai Tukar Nelayan dengan target sebesar 104-105

Kemudian pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 merupakan upaya terencana dan sistematis yang tanggap terhadap perubahan. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Timur memuat tema ***"OPTIMALISASI DIVERSIFIKASI EKONOMI YANG DIDUKUNG DENGAN PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG BERDAYA SAING"*** yang dijabarkan dalam prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri;
2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya;

4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar;
5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik;
8. Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan oleh Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2025 antara lain meliputi :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan target sebesar 78,60
2. Harapan Lama sekolah dengan target sebesar 14,12
3. Rata-rata lama sekolah dengan target sebesar 10,21
4. Usia Harapan Hidup dengan target sebesar 74,89
5. Prevalensi Stunting dengan target sebesar 19,80
6. Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target sebesar 4,60 - 5,14
7. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan target sebesar 67,64
8. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dengan target sebesar 6,26 - 6,58
9. Tingkat Kemiskinan dengan target sebesar 5,05 - 5,67
10. Indeks Gini dengan target sebesar 0,310 - 0,321
11. LPE Non Migas dan Batubara dengan target sebesar 6,40 - 7,20
12. Indeks Kedalaman Kemiskinan dengan target sebesar 0,740
13. Indeks Keparahan Kemiskinan dengan target sebesar 0,120
14. Tingkat Inflasi dengan target sebesar 2,5 ±1
15. Indeks Kulaitas Layanan Infrastruktur (IKLI) dengan target sebesar 8,39
16. Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup dengan target sebesar 80,19
17. Persentase Penurunan Emisi dari BAU dengan target sebesar 27,53
18. Indeks Kualitas Air dengan target sebesar 71,41
19. Indeks Kualitas air Laut dengan target sebesar 81,47
20. Indeks Kualitas Udara dengan target sebesar 84,32
21. Indeks Kualitas Lahan dengan target sebesar 88,43
22. Peresentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari Business As Usual (BAU) dengan target sebesar 24,40

23. Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dengan target sebesar 12,39
24. Indeks Reformasi Birokrasi dengan target sebesar 74,00 (B)
25. Indeks Kepuasaan Masyarakat dengan target sebesar 86,30
26. Sistem Merit dengan target sebesar 275
27. Indeks SPBE dengan target sebesar 3,40
28. Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan target sebesar 80,01 (A)
29. Tingkat Maturitas SPIP dengan target sebesar Level 3 skor 3,726

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, maka dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pencapaian arah kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2025 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten yang dituangkan dalam dokumen RKPD.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yaitu :

“ Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan”

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu **“ Rata-Rata Capaian Indikator Tujuan Daerah”.**

Dalam pencapaian tujuan Rencana Kerja tersebut kemudian dijabarkan dalam Sasaran Rencana Kerja beserta Indikatornya, yaitu sebagai berikut :

“ Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah “

Dengan indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut yaitu :

1. Score Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran Daerah

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026.

Adapun target indikator Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.1.

Target Indikator Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan		Rata-rata capaian indikator tujuan daerah	%	90
	SASARAN Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	Score Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Score	2,50
		Rata-rata capaian indikator sasaran daerah	%	96,5

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2025, secara garis besar dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026, yaitu " Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah " dan " Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah ". Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 berisi program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
    1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
    2. Mempedomani RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Klartanegara Tahun 2021-2026
    3. Mempedomani Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dimana kemudian dilakukan penyesuaiannya didalam dokumen Rencana Kerja (RENJA) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Kalsifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja Tahun sebelumnya
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan
6. Mempertimbangkan pelaksanaan tugas dan fungsi internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dicerminkan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

b) Rekapitulasi Program

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Jumlah Program yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebanyak 3 (Tiga) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebanyak 14 (empat belas) kegiatan
3. Jumlah Sub Kegiatan akan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebanyak 63 (enam puluh tiga) Sub Kegiatan.
4. Jumlah Kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2025 sebesar Rp49.775.841.398 *(*Empat Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus

Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

c) Rumusan Program dan Kegiatan memiliki beberapa sub kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD dikarenakan beberapa hal antara lain :

1. Adanya tambahan sub kegiatan baru menyesuaikan dengan analisis kebutuhan dan paket pekerjaan
2. Adanya penyesuaian indikator, target dan satuan pada sub kegiatan

d) Tabel Rencana Program, Kegiatan dan sub kegiatan

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 disertai indikator serta sumber pendanaan tersaji pada tabel 3.3.

Tabel 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	~~3~~	~~4~~	5	6	7	8	9	10	11
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA	Nilai / Peringkat	Tenggarong	88,85 (AA)	35.640.841.398	APBD		88,50 (A)	25.275.196.453
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	Tenggarong	9	750.000.000	APBD		12	550.000.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	Tenggarong	3	450.000.000	APBD		5	250.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	Tenggarong	0	-			4	50.000.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Tenggarong	3	50.000.000	APBD		2	150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	Tenggarong	1	150.000.000	APBD		1	100.000.000
5	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	dokumen	Tenggarong	1	50.000.000	APBD			
6	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Berita Acara	Tenggarong	1	50.000.000	APBD			
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	Tenggarong	6	16.658.886.158,00	APBD		6	17.752.943.365
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Tenggarong	1.392	16.350.026.358	APBD		1.668	17.419.083.565
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	Laporan	Tenggarong	6	308.859.800	APBD		5	308.859.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Tenggarong	0	-	APBD		1	25.000.000
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	Tenggarong	4	150.000.000	APBD		6	250.000.000
8	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	Tenggarong	0	-	APBD		1	50.000.000
9	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Tenggarong	1	50.000.000	APBD		1	50.000.000
10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Laporan	Tenggarong	0	-	APBD		1	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Barang Milik Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD								
11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Tenggarong	3	100.000.000	APBD		3	100.000.000
I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	dokumen	Tenggarong	8	625.000.000	APBD		8	500.000.000
		Jumlah Pakaian	Stel		116		APBD		0	
		Jumlah ASN	Orang	Tenggarong	60		APBD		60	
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	Tenggarong	116	150.000.000	APBD			
13	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Juumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	Tenggarong	0	-	APBD		4	25.000.000
14	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	umlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan	dokumen	Tenggarong	8	75.000.000	APBD		4	75.000.000
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	Tenggarong	60	400.000.000	APBD	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM	60	400.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								KUKAR BEBAYA		
I.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	Tenggarong	9	2.513.361.800	APBD		9	1.754.901.800
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Tenggarong	1	200.000.000	APBD		48	200.000.000
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Tenggarong	3	450.000.000	APBD		9	450.000.000
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Tenggarong	2	94.901.800	APBD		950	94.901.800
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Tenggarong	3	100.000.000	APBD		2.500	100.000.000
20	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Tenggarong	4	45.000.000	APBD		20	45.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Tenggarong	150	750.000.000	APBD		165	700.000.000
22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Tenggarong	5	150.000.000	APBD		65	100.000.000
23	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Tenggarong	1	723.460.000	APBD		1	65.000.000
I.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	Tenggarong	100	6.837.145.800	APBD		100	197.500.000
24	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Tenggarong	0	-			5	0
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Tenggarong	1	6.837.145.800	APBD		14	197.500.000
I.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Bulan	Tenggarong	12	4.080.948.540	APBD		12	2.272.313.550

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pemerintahan Daerah yang disediakan								
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Tenggarong	12	2.221.900.000	APBD		12	1.521.900.000
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Tenggarong	12	1.859.048.540	APBD		12	750.413.550
I.8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	Persen	Tenggarong	100	4.025.499.100	APBD		100	1.997.537.738
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Tenggarong	21	239.429.620	APBD		15	239.429.620

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Tenggarong	28	233.002.620	APBD		25	233.002.620
30	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	unit	Tenggarong		-			2	50.000.000
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Tenggarong	6	2.500.000.000	APBD		36	755.676.838
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	Tenggarong	11	1.053.066.860	APBD		132	719.428.660
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	Persen	Tenggarong	100	4.430.000.000	APBD		100	4.212.400.000
II.9	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	dokumen	Tenggarong	6	2.330.000.000	APBD		22	2.125.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Pendampingan perencanaan	Lembaga/OPD	Tenggarong	59		APBD		58	
		Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kali	Tenggarong	2		APBD		1	
		Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Forum	Tenggarong	72		APBD		3	
		Jumlah pelaksanaan Musrenbang	Kali	Tenggarong	2		APBD		1	
33	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	dokumen	Tenggarong	2	600.000.000	APBD		1	600.000.000
34	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	Tenggarong	1	400.000.000	APBD	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KUKAR BEBAYA	1	240.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	Tenggarong	2	90.000.000	APBD		1	90.000.000
36	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	Tenggarong	72	100.000.000	APBD		56	45.000.000
37	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	Tenggarong	2	190.000.000	APBD		1	250.000.000
38	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	Tenggarong	20	200.000.000			18	200.000.000
39	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	Tenggarong	3	750.000.000	APBD		2	700.000.000
II.10	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Masukan	Tenggarong	3	1.150.000.000	APBD		4	1.034.900.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)								
		Jumlah pendampingan ketersediaan data	urusan	Tenggarong	32		APBD		32	
		Jumlah layanan data dan informasi kecamatan	layanan data dan informasi	Tenggarong	1				6	
		Jumlah Rancangan Regulasi Daerah	Rancangan Regulasi	Tenggarong	0		APBD		0	
		Jumlah Personil Pembinaan Data	Orang	Tenggarong	177		APBD		30	
40	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	Tenggarong	3	400.000.000	APBD	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM DISAPA (DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK) dan PROGRAM KESEJAHTER	3	452.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	~~3~~	~~4~~	5	6	7	8	9	10	11
								AAN SOSIAL IDAMAN		
41	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	Tenggarong	177	500.000.000	APBD	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM DISAPA (DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK)	56	480.000.000
42	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	Tenggarong	2	250.000.000	APBD	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM DISAPA (DIGITALISASI	1	102.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								PELAYANAN PUBLIK)		
II.11	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen	Tenggarong	7	950.000.000	APBD		13	1.052.500.000
43	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Tenggarong	2	200.000.000	APBD		8	202.500.000
44	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama	Tenggarong	0	0	APBD		1	150.000.000
45	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	Tenggarong	5	750.000.000	APBD		4	700.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD	Persen	Tenggarong	100	9.705.000.000	APBD		100	3.109.249.440
		Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	Persen	Tenggarong	100		APBD		100	
		Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD	Persen	Tenggarong	100		APBD		100	
III.12	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	Tenggarong	81	2.405.000.000	APBD		71	1.176.750.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	Tenggarong	11	230.000.000	APBD		11	115.000.000
47	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Tenggarong	11	200.000.000	APBD	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KUKAR BEBAYA	11	70.000.000
48	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	laporan	Tenggarong	12	245.000.000	APBD		11	70.000.000
49	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	Tenggarong	3	380.000.000	APBD		1	250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	Tenggarong	13	200.000.000	APBD		12	236.750.000
51	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	Tenggarong	13	200.000.000	APBD	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KUKAR BEBAYA	12	70.000.000
52	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	Tenggarong	13	200.000.000	APBD		12	115.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Tenggarong	6	750.000.000	APBD	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL IDAMAN	1	250.000.000
III.13	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	dokumen	Tenggarong	38	3.500.000.000	APBD		35	977.500.000
54	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	Tenggarong	6	300.000.000	APBD		6	67.500.000
55	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	Tenggarong	6	250.000.000	APBD	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM	6	92.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								KUKAR BEBAYA		
56	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	Tenggarong	6	300.000.000	APBD		6	200.000.000
57	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	Tenggarong	3	900.000.000	APBD		1	90.000.000
58	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Tenggarong	5	300.000.000	APBD		5	90.000.000
59	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam	Perangkat Daerah	Tenggarong	5	250.000.000	APBD	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN :	5	92.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA						PROGRAM KUKAR BEBAYA		
60	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	Tenggarong	5	300.000.000	APBD		5	255.000.000
61	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	Tenggarong	2	900.000.000	APBD		1	90.000.000
III.14	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	dokumen	Tenggarong	71	3.800.000.000	APBD		68	954.999.440
62	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	Tenggarong	4	450.000.000	APBD		4	45.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Tenggarong	4	250.000.000	APBD	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KUKAR BEBAYA	4	92.500.000
64	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Tenggarong	4	300.000.000	APBD		4	249.999.620
65	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	Tenggarong	3	1.200.000.000	APBD		1	90.000.000
66	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir	dokumen	Tenggarong	20	250.000.000	APBD		18	45.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)								
67	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	Tenggarong	20	250.000.000	APBD	PROGRAM DEDIKASI KUKAR IDAMAN : PROGRAM KUKAR BEBAYA	18	92.500.000
68	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	Tenggarong	20	300.000.000	APBD		18	249.999.820
69	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	Tenggarong	2	800.000.000	APBD		1	90.000.000
Total Pagu Indikatif						49.775.841.398,00	Total pagu Indikatif			32.596.845.893

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu Tahun kedepan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

5.1. CATATAN DALAM PENYUSUNAN RENJA

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 antara lain :

a. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara

b. Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026, namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 perludilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sub kegiatan. Selanjutnya penyesuaian ini akan diakomodir pada saat dilakukannya penyusunan terhadap Renstra Tahun 2025-2029

c. Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebagai komitmen untuk pelaksanaan kebijakan

Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target perangkat daerah serta pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidahbpelaksanaan sebagai berikut :

a. Seluruh aparatur sipil negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab dan berkewajiban untuk melaksanakan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sesuai tugas dan kewenangannya
b. Menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah yakni RPJMD dan RKPD dengan dokumen perencanaan perangkat daerah yakni RENSTRA dan RENJA
c. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 menjadi dasar dalam penyusunan RKA dan DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025
d. Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunana Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintajh Daerah.
e. Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

f. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Program, kegiatan dan Sub kegiatan pada Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkag-langkah sebagai berikut :

a. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja untuk setiap triwulannya
b. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja maka dokumen Rencana Kerja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku
c. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025
d. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
e. Seluruh aparatur sipil negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai dokumen perencanaan Tahunan organisasi perangkat daerah.

d. RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), disebutkan bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2). Hal tersebut dimaksudkan agar rencana pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan sumbangan dari pencapaian pembangunan daerah secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota dan provinsi, serta kementerian/lembaga. Jenjang perencanaan tersebut berupa perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Dengan demikian daerah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Sejalan dengan dasar pikir di atas maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2025 menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 dimaksudkan untuk mengoptimalkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan sehingga tercapainya tujuan pelayanan publik di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 sekaligus dalam upaya pencapaian target sasaran program yang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2025, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
18. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Berdasarkan pertimbangan diatas, Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen Rancangan Renja Tahun 2025 sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menentukan prioritas program satu tahun dan digunakan sebagai pedoman dalam rencana kerja tahunan.

b. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menyamakan persepsi dan tercapainya komitmen bersama untuk mencapai tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta memahami dan menilai arah kebijakan dan program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terutama untuk mendukung terlaksananya percepatan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih dengan Fokus Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurun waktu satu tahun (2025).

1.3.2 Tujuan :

a. Tersedianya Dokumen Perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam kurun waktu 1 tahun sebagai bagian dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Tersedianya pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam kurun waktu satu tahun (2025) dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

c. Terciptanya keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan aparatur yang terencana dan memiliki akuntabilitas melalui penyusunan rencana kegiatan tahunan.

d. Tersedianya suatu tolok ukur dalam melakukan evaluasi dan penilaian kinerja tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 5 (lima) Bab terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan gambaran umum tentang penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Perangkat Daerah, fungsi Renja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

4.1 Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini memuat hal-hal yang dianggap penting serta rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan Renja BKPSDM.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara umum rata-rata capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 mencapai 97,07% dengan predikat kinerja "Sangat Tinggi" dan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.296.810.806,00 dari pagu anggaran Rp. 40.497.194.742,00 (89,63%).

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan 3 (tiga) program. Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

Realisasi program tahun anggaran 2023:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

   Indikator kinerja untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu "Nilai SAKIP Perangkat Daerah" target kinerja 92,00 dengan realisasi 92,70 (100,76%).

   Capaian kinerja di atas merupakan capaian kinerja tahun 2022 mengingat hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 belum dikeluarkan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan. Faktor pendukung capaian kinerja ini antara lain:

   a. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur di lingkungan BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara;
   b. Penerapan teknologi informasi pada beberapa program/kegiatan (aplikasi Simpeg Idaman, Sim Gaji, FMIS, SIPD, Simda BMD, e-Pantau dan Srikandi); dan

c. Perubahan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan evaluai SAKIP Perangkat Daerah.

Rata-rata capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah 100% dan 91,83% dengan rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target kinerja 20 dokumen, dengan realisasi 20 dokumen (100,00%):
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, target kinerja 2 dokumen, dengan realisasi 2 dokumen (100,00%)
    2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, target kinerja 15 dokumen, dengan realisasi 15 dokumen (100,00%)
    3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target kinerja 3 dokumen, dengan realisasi 3 dokumen (100,00%)
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, target kinerja 15 Laporan, dengan realisasi 15 Laporan (100,00%):
    1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, target kinerja 1412 orang/bulan, dengan realisasi 1407 orang/bulan (99,65%)
    2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, target kinerja 1 laporan, dengan realisasi 1 laporan (100,00%)
    3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, target kinerja 12 laporan, dengan realisasi 12 laporan (100,00%)
c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, target kinerja 2 dokumen, dengan realisasi 2 dokumen (100,00%):
    - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, target kinerja 2 laporan, dengan realisasi 2 laporan (100,00%)

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, target kinerja 1 Dokumen, dengan realisasi kinerja 1 Dokumen (100,00%):
    1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, target kinerja 3 paket, dengan realisasi kinerja 3 paket (100,00%); dan
    2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, target kinerja 50 orang, dengan realisasi 1 orang (2,00%)
e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, target kinerja 7 layanan, dengan realisasi 7 layanan (100,00%);
    1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, target kinerja 1 paket, dengan realisasi 1 paket (100,00%);
    2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, target kinerja 3 paket, realisasi kinerja 3 paket (100,00%);
    3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, target kinerja 3 paket, dengan realisasi 3 paket (100,00%);
    4. Fasilitasi Kunjungan Tamu, target kinerja 1 laporan, realisasi 1 laporan (100,00%)
    5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, target kinerja 2 laporan, realisasi kinerja 2 laporan (100,00%);
    6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, target kinerja 450 dokumen, realisasi 47 dokumen (10,44%).
f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, target kinerja 100,00%, dengan realisasi kinerja 100,00% (100,00%):
    1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, target kinerja 297 Unit, realisasi 297 Unit (100,00%);
    2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, target kinerja 142 Unit, realisasi 142 Unit (100,00%).
g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target kinerja 12 bulan, dengan realisasi kinerja 12 bulan (100,00%):

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, target kinerja 1 Laporan, dengan realisasi 1 Laporan (100,00%);
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, target kinerja 12 Laporan, dengan realisasi 12 Laporan (100,00%);
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, target kinerja 1 Laporan, dengan realisasi 1 Laporan (100,00%); dan
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, target kinerja 12 Laporan, dengan realisasi 12 Laporan (100,00%).

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target kinerja 12 unit, dengan realisasi 12 unit (100,00%).
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, target kinerja 12 unit, dengan realisasi 12 unit (100,00%).

2. Program Kepegawaian Daerah :

Indikator kinerja untuk Program Kepegawaian Daerah yaitu "Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara" target kinerja 93,00% dengan realisasi 99,97% (96,88%). Capaian kinerja untuk Program Kepegawaian Daerah tahun 2023 melebihi target kinerja yang ditetapkan. Faktor pendukung pencapaian target kinerja ini yaitu :

a. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terbaru yang disesuaikan dengan SOTK Perangkat Daerah yang menjadi dasar penyusunan Bezetting dan Existing pegawai sebagai dasar untuk menyusun kebutuhan jabatan baik jabatan administrasi maupun jabatan fungsional.
b. Persetujuan Kemenpan RB terhadap usulan formasi penerimaan PPPK tahun 2023 sebesar 3.000 formasi.
c. Tersedianya anggaran dan fasilitas lainnya untuk melaksanakan rekrutmen PPPK tahun 2023.

Capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam Program Kepegawaian Daerah sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN, target kinerja 1147 ASN, dengan realisasi 3183 ASN (277,51%).

   Capaian kinerja untuk Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN melebihi target yang ditetapkan. Secara umum capaian kinerja sub kegiatan yang termasuk dalam Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN adalah 100%, dengan rincian sebagai berikut :

   1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, target kinerja 1 dokumen, dengan realisasi 1 dokumen (100,00%);
   2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, target kinerja 2 Dokumen, dengan realisasi 2 Dokumen (100,00%);
   3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN, target kinerja 1 Dokumen, dengan realisasi 1 Dokumen (100,00%);
   4. Fasilitasi lembaga profesi ASN, target kinerja 1 Lembaga, dengan realisasi 1 Lembaga (100,00%);
   5. Pengelolaan data Kepegawaian, target kinerja 2 Dokumen, dengan realisasi 2 Dokumen (100,00%); dan
   6. Evaluasi Data,Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian, target kinerja 1 Laporan, dengan realisasi 1 Laporan (100,00%).

b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, target kinerja 2928 ASN, dengan realisasi 2568 ASN (87,70%);

   Target kinerja untuk Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN tidak tercapai, antara lain disebabkan :

   1. Dokumen Standar Kompetensi Jabatan belum selesai disusun; dan
   2. Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja sesuai SOTK terbaru belum selesai disusun.

   Secara umum capaian kinerja sub kegiatan yang termasuk dalam Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN sesuai target kinerja yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengelolaan Mutasi ASN, target kinerja 1 Dokumen, realisasi 1 Dokumen (100,00%);
2. Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN, target kinerja 1 Dokumen, dengan realisasi 1 Dokumen (100,00%); dan
3. Pengelolaan promosi ASN, target kinerja 1 Dokumen, dengan realisasi kinerja 1 Dokumen (100,00%).

c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, target kinerja 751 ASN, dengan realisasi 749 ASN (99,73%);

Capaian kinerja untuk Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN kurang dari target kinerja, antara lain disebabkan :

1. Rendahnya minat ASN Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meningkatkan kapasitas kinerjanya;
2. Data PNS yang sudah memiliki pendidikan lebih tinggi tidak terdata pada aplikasi Simpeg maupun SIASN.

Adapun rincian capaian kinerja untuk sub kegiatan yang termasuk dalam Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas kinerja ASN, target kinerja 544 Orang, dengan realisasi 566 Orang (104,04%);
2. Pengelolaan Assesment Center, target kinerja 2 Dokumen, dengan realisasi 2 Dokumen (100,00%);
3. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN, target kinerja 127 Orang, dengan realisasi 127 Orang (100,00%);

d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, target kinerja 12607 ASN, dengan realisasi 8540 ASN (67,74%)

Target kinerja untuk Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur tidak tercapai, dengan kendala antara lain :

1. Kesadaran PNS untuk membuat Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPK PNS) masih rendah;
2. PNS belum memahami penyusunan SKP sesuai Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022; dan
3. Pengetahuan terkait dengan penyusunan SKP masih rendah.

Solusi/rekomendasi yang bisa dilaksanakan untuk mengatasi kendala di atas antara lain :

1. Perlunya Ketegasan dari Pemerintah Daerah untuk menerapkan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai yang tidak menyampaikan SKP PNS pada BKPSDM.
2. Perlu diadakan bimbingan secara berkelanjutan pada manajemen kinerja khususnya terhadap penyusunan SKP.

Capaian kinerja sub kegiatan yang termasuk dalam Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, target kinerja 1 dokumen, dengan realisasi 1 dokumen (100,00%);
2. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, target kinerja 1 Dokumen, dengan realisasi 1 Dokumen (100,00%);
3. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, target kinerja 1 dokumen, dengan realisasi 1 dokumen (100,00%);
4. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai, target kinerja 176 Orang, dengan realisasi kinerja 176 Orang (100,00%);
5. Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, target kinerja 2 Laporan, dengan realisasi kinerja 2 Laporan (100,00%).
6. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai, target kinerja 2 Dokumen, dengan realisasi kinerja 2 Dokumen (100,00%)

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Indikator kinerja untuk Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu “Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional” target kinerja 28,00% dengan realisasi 29,64% (105,86%).

Capaian kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melebihi target kinerja yang ditetapkan. Faktor pendukung pencapaian target kinerja program ini antara lain:

a. Kerjasama yang dilakukan daerah dengan kementerian/Lembaga/ Penyelenggara Pelatihan;

b. Regulasi yang mewajibkan PNS harus melaksanakan pengembangan kompetensi minimal 20 JP pertahun
c. Tersedianya Human Capital Development Plan, meskipun belum mengakomodasi kebutuhan seluruh ASN Kabupaten Kutai Kartanegara;
d. Anggaran pengembangan kompetensi yang semakin meningkat; dan
e. Tersedianya ruang belajar di beberapa Perangkat Daerah sebagai tempat pengembangan kompetensi.

Capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, target kinerja 565 ASN, dengan realisasi 610 ASN (107,96%)
    1. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, target kinerja 1 dokumen, dengan realisasi 1 dokumen (100,00%)
    2. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum, target kinerja 565 Orang, dengan realisasi 610 Orang (107,96%).
b. Kegiatan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional, target kinerja 413 ASN, dengan realisasi 502 ASN (121,55%)

Capaian kinerja kegiatan ini melebihi target kinerja karena adanya kesalahan penetapan kinerja pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 dimana adanya pergeseran biaya Pelatihan Kepemimpinan Administrator menjadi Pelatihan Fungsional tidak diikuti perubahan target kinerja.

1. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, target kinerja 13 orang, dengan realisasi 13 orang (100,00%); dan

2. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan, target kinerja 5 Laporan, dengan realisasi 5 Laporan (100,00%)

Untuk lebih jelasnya disajikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 pada tabel II.1 (T-C.29) sebagai berikut:

Tabel T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN

PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2023

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021		Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
							2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1			2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (11 + 12 + 14)/10
5			UNSUR PENUNJANG FUNGSI PEMERINTAHAN																	
5.03			KEPEGAWAIAN																	

						Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	80	61	65	70	75	80	80	42,45	54,94	70	74,46	106,37 %		57,28	71,60%
						Indeks Kepuasaan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	Nilai	90	80	82	85	87	90	90	76,33	84,54	85	88,25	103,82 %		83,04	92,27%
5.03.01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75, 89	85	86	87	88	89	89	84,94	92,7	87	75	85,77 %		84,09	94,48%
5.03.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	110	24	23	24	23	23	227	153	20	10	6	60,00 %		179	78,85%
5.03.01.2.01.01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	32	7	6	7	6	6	64	42	2	3	2	66,67 %		46	71,88%
5.03.01.2.01.06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	75	15	15	15	15	15	150	106	15	5	3	60,00 %		124	82,67%
5.03.01.2.01.07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	2	2	2	2	2	13	5	3	2	1	50,00 %		9	69,23%

5.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	89	15	15	15	15	15	164	116	15	3	0	0,00%		131	79,88%
5.03.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	6480	1080	1080	1080	1080	1080	11880	9679	1407	1190	554	46,55 %		11.640	97,98%
5.03.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	1	1	1	1	1	10	7	1	1	1	100,00 %		9	90,00%
5.03.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	60	12	12	12	12	12	120	84	12	12	7	58,33 %		103	85,83%
5.03.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	10	2	2	2	2	2	20	13	2	2	1	50,00 %		16	80,00%

5.03.01.2.03.05			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	10	2	2	2	2	2	20	13	2	2	1	50,00 %		16	80,00%
5.03.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3	1	2	2	3	2	13	6	1	2	0	0,00%		7	53,85%
5.03.01.2.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Orang	111	0	0	30	30	30	201	0	0	30	0	0,00%		-	0,00%
5.03.01.2.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	50	50	50	50	50	280	120	1	50	0	0,00%		121	43,21%
5.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8	7	7	8	8	8	46	21	7	8	0	0,00%		28	60,87%
5.03.01.2.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	1	1	1	1	1	5	2	1	1	1	100,00 %		4	80,00%
5.03.01.2.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	3	3	3	3	18	9	3	3	1	33,33 %		13	72,22%
5.03.01.2.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	3	3	3	3	3	3	18	9	3	3	1	33,33 %		13	72,22%

5.03.01.2.06.07			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	3	0	0	2	2	2	9	0	0	2	1	50,00 %		1	11,11%
5.03.01.2.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Paket	1	1	1	1	1	1	6	2	1	1	0	0,00%		3	50,00%
5.03.01.2.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	1	5	2	2	1	0	0,00%		4	80,00%
5.03.01.2.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1000	450	450	450	450	450	3250	1900	47	450	72	16,00 %		2.019	62,12%
5.03.01.2.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen yang mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	-	1	2	3			6	0	3	3	1	33,33 %		4	66,67%
5.03.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	0,00%		67	66,67%
5.03.01.2.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	1	1	1	1	1	9	7	142	6	0	0,00%		149	1655,56%

5.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	7	58,33 %		10	86,11%
5.03.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	1	1	1	5	2	1	1	0	0,00%		3	60,00%
5.03.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	7	58,33 %		31	51,67%
5.03.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	1	1	5	2	1	1	0	0,00%		3	60,00%
5.03.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	12	12	60	12	12	12	7	58,33 %		31	51,67%
5.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	41	12	12	12	12	12	101	69	12	14	4	28,57 %		85	84,16%

5.03.01.2.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	41	12	12	12	12	12	101	69	12	15	4	26,67 %		85	84,16%
5.03.02		Program Kepegawaian Daerah		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Persen	91,5	92	93	94	95	96	96	89,13	99,97	94	0	0,00%		63	65,66%
5.03.02.2.01			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	ASN	1407	1058	1147	1262	1365	1306	7545	3463	3183	1262	0	0,00%		6.646	88,08%
5.03.02.2.01.02			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	5	1	1	1	1	1	10	7	1	1	1	100,00 %		9	90,00%
5.03.02.2.01.03			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	1	1	2	1	1	7	3	2	1	0	0,00%		5	71,43%

5.03.02.2.01.06			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	1	6	1	1	0	1	10	6	1	1	0	0,00%		7	70,00%
5.03.02.2.01.08			Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	1	2	1	1	1	7	3	1	1	0	0,00%		4	57,14%
5.03.02.2.01.10			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	1	2	0	0	0	5	4	0	3	0	0,00%		4	80,00%
5.03.02.2.01.11			Pengelolaan data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	2	1	1	1	1	1	7	3	2	1	0	0,00%		5	71,43%
5.03.02.2.01.12			Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	1	2	1	1	1	1	7	3	2	1	0	0,00%		5	71,43%
5.03.02.2.02		Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan	ASN	2510	2790	2928	2583	2495	2473	15779	13939	2568	2583	0	0,00%		16.507	104,61%
5.03.02.2.02.01			Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi,	Dokumen	1	2	2	2	2	1	10	6	1	1	0	0,00%		7	70,00%

				Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah															
5.03.02.2.02.02			Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	2	2	2	1	2	1	10	6	1	1	0	0,00%		7	70,00%
5.03.02.2.02.03			Pengelolaan promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	1	2	2	2	1	2	10	6	1	1	0	0,00%		7	70,00%
5.03.02.2.03		Pengembangan kompetensi ASN		Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi	ASN	680	560	560	560	360	360	3080	1737	749	1190	0	0,00%		2.486	80,71%
5.03.02.2.03.01			Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	285	380	380	380	180	180	1785	1023	566	590	1.824	309,15%		3.413	191,20%
5.03.02.2.03.02			Pengelolaan Assesment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	4	1	1	1	1	1	9	5	2	3	1	33,33%		8	88,89%
5.03.02.2.03.04			Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	63	100	100	100	100	100	563	186	127	121	5	4,13%		318	56,48%
5.03.02.2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	ASN	13514	13084	12607	12093	11491	10854	73643	36395	8540	12093	0	0,00%		44.935	61,02%
5.03.02.2.04.01			Penyusunan Kebijakan Penilaian	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan	Dokumen	n/a	1	1	1	1	1	5	2	1	1	1	100,00%		4	80,00%

			dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur															
5.03.02.2.04.02			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	2	2	2	2	1	1	10	6	1	1	0	0,00%		7	70,00%
5.03.02.2.04.03			Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan	1	1	1	1	1	5	10	6	1	1	0	0,00%		7	70,00%
5.03.02.2.04.05			Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	n/a	348	348	348	348	348	1740	365	176	348	304	87,36%		845	48,56%
5.03.02.2.04.08			Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	60	15	15	17	20	20	147	77	2	1	1	100,00%		80	54,42%
5.03.02.2.04.09			Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	15	35	35	30	30	30	175	43	2	35	11	31,43%		56	32,00%
5.04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
5.04.02		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase ASN yang mengikuti pengembangan	Persen	15,94	18,38	20,65	22,64	24,64	26,64	26,64	39,98	29,64	26,76	5	17,55%		74	278,97%

		kompetensi teknis, manajerial dan fungsional																	
5.04.02.2.01	Pengembangan kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	ASN	1486	210	200	200	200	200	2496	1978	610	784	3.683	469,77%		6.271	251,24%
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	1486	210	200	200	200	200	2496	1978	610	784	3.683	469,77%		6.271	251,24%
5.04.02.2.02	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	ASN	673	120	122	112	106	112	1245	1023	502	685	0	0,00%		1.525	122,49%
5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	orang	5	0	12	12	6	12	47	16	13	12	0	0,00%		29	61,70%

			Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota																
5.04.02.2.02.07			Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	5	1	1	1	1	1	10	6	5	5	1	20,00 %		12	120,00%

2.1.1 Program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada tahun 2023, tidak ada program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

a. Mutasi dan Promosi ASN (87,70%)
b. Pengembangan Kompetensi ASN (99,73%)
c. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (67,74%)

Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (99,65%)
b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (2,00%)
c. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (10,44%)

2.1.2 Program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
f. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
g. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
j. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
k. Fasilitasi Kunjungan Tamu
l. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
m. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
n. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
o. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
p. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
q. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
r. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
s. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
t. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
u. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
v. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
w. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
x. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN
y. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
z. Pengelolaan Data Kepegawaian
å. Evaluasi Data,Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
bb. Pengelolaan Mutasi ASN
cc. Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN
dd. Pengelolaan Promosi ASN
ee. Pengelolaan Assesment Center

ff. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
dd. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
ee. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
ii. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
jj. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
kk. Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN
ll. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
jj. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
kk. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
ll. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan

2.1.3 Program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (100,76%);
b. Program Kepegawaian Daerah (107,49%)
c. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (105,86%)

Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (277,51%);
b. Pengembangan kompetensi Teknis (107,96)
c. Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional (121,55%)

Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

a. Peningkatan kapasitas kinerja ASN (104,04%)
b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan

pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum (107,96%)

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan antara lain :

a. Lemahnya pemahaman terhadap sistem perencanaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b. Lemahnya koordinasi antar bidang;
c. Sistem tata kelola pemerintahan masih banyak yang bersifat manual;
d. Aplikasi pemberhentian belum tersedia secara online
e. Kasus-kasus terhambat oleh berkas yang kurang lengkap
f. SDM pengelola kasus kurang memahami proses pemberian hukuman disiplin
g. Kesadaran PNS untuk membuat Penilaian Prestasi Kerja PNS masih rendah
h. Format Laporan PPK PNS 2021 sesuai dengan Permenpan 8 sementara PPK PNS 2022 harus mengacu pada Permenpan 6 sehingga banyak PNS yang belum memahami penyusunan SKP sesuai Permenpan.
i. Pengetahuan terkait dengan penyusunan SKP masih rendah
j. Seleksi Penerimaan ASN berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh BKN Pusat
k. Proses penerimaan ASN tahun 2021 yang belum selesai dan menunggu pengumuman kelulusan PPPK Guru Tahap III dari Kemendikbud RI
l. SOP belum sesuai dengan aplikasi
m. SDM Pengelola layanan kurang memahami prosedur layanan
n. Perangkat teknologi informasi belum sesuai standar
o. Penyusunan Data awal Calon Penerima Beasiswa tidak berbasis data riil sehingga tidak sesuai dengan jumlah pendaftar/penerima Beasiswa
p. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Beasiswa Kukar Idaman tidak memuat tentang PNS penerima Beasiswa Tematik

q. Belum adanya Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar/Izin Belajar yang disusun dalam rangka pemenuhan dan kebutuhan pengembangan kompetensi jabatan ASN
r. Aplikasi yang tersedia belum mengakomodir indikator kedisiplinan kepegawaian secara keseluruhan tetapi hanya terkait absensi /rekaman kehadiran pegawai namun untuk daerah terpencil aplikasi tidak dapat diakses karena tidak tersedianya jaringan internet
s. Ketegasan pemerintah daerah untuk melaksanakan ketentuan/peraturan penegakan atas pelanggaran disiplin kepegawaian masih belum maksimal.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan antara lain :

a. Penerapan teknologi informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja (e-RPJMD, SIPD, SIMDA Keuangan, e-Pantau);
b. Tersedianya aplikasi penatausahaan keuangan yang memudahkan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
c. Penggunaan aplikasi Simda BMD dalam penatausahaan Barang Milik Daerah;
d. Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI

Faktor-faktor penyebab melebihinya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan antara lain :

a. Kerjasama yang dilakukan daerah dengan kementerian/Lembaga/ Penyelenggara Pelatihan;
b. Regulasi yang mewajibkan PNS harus melaksanakan pengembangan kompetensi minimal 20 JP pertahun;
c. Pengembangan Kompetensi ASN yang dilaksanakan Secara Online Kolaborasi lintas K/L dalam pelaksanaan Literasi Digital Sektor Pemerintahan;
d. Penerapan SIASN secara tepat guna dan tepat waktu;
e. Proses layanan berbasis online dan papperless;
f. Penggunaan aplikasi layanan kepegawaian yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui Aplikasi SIASN, yang

berimplikasi pada beberapa layanan seperti kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;

g. Pengembangan Kompetensi ASN yang dilaksanakan Secara Online Kolaborasi lintas K/L dalam pelaksanaan Literasi Digital Sektor Pemerintahan;

h. Tersedianya aplikasi pelayanan proses ijin perceraian yang terintegrasi dengan aplikasi kepegawaian; dan

i. Kekeliruan penetapan target kinerja dalam penyusunan rencana kerja tahun 2023 dan rencana kerja perubahan tahun 2023.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Dengan adanya capaian kinerja yang tidak memenuhi target kinerja khususnya pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Kepegawaian Daerah maka seluruh bidang di lingkungan BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara harus bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai target kinerja program yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dengan cara melaksanakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, melakukan evaluasi secara rutin dan berkala serta melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi yang disepakati.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan pengganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perlu dilakukan perencanaan secara sistematis dalam penyusunan rencana kerja, rencana kerja perubahan, penganggaran, dan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta melakukan evaluasi secara rutin dan berkala sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan hasil maksimal.

Untuk capaian sasaran strategis tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.2 Capaian IKU Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%Realisasi Kinerja	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM	Indeks	80	76,33	95,41	82	84,54	103,10	Meningkat
Rata-rata Capaian Kinerja						82	84,54	103,10	

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2023 antara lain :

1. Tersedianya aplikasi layanan kepegawaian yang memudahkan pemberian layanan kepada seluruh ASN
2. Tersedianya aplikasi survei Kukar yang memudahkan pelaksanaan survei
3. Pengembangan kompetensi ASN BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara
4. Komitmen seluruh ASN BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh ASN.

Meskipun target kinerja Indikator Kinerja Utama sudah tercapai, tetapi masih terdapat permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan sebagai berikut :

1. Waktu Penyelesaian Layanan masih dirasakan lambat oleh ASN Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain:
    a. Belum ada Standar Pelayanan untuk masing-masing jenis layanan yang dikeluarkan oleh BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara.
    b. Belum melakukan evaluasi dan revisi terhadap SOP, karena terdapat perubahan aturan terkait administrasi kepegawaian.

c. Petugas layanan belum memiliki keterampilan khusus terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

2. Kesesuaian Produk Layanan masih dirasakan rendah oleh ASN Kabupaten Kutai Kartanegara, hal ini disebabkan oleh :
   a. Database ASN belum terintegrasi dengan sistem pelayanan.
   b. Ketelitian dalam melakukan verifikasi dokumen layanan kepegawaian masih lemah.
3. Kualitas Sarana dan Prasarana yang dianggap kurang memadai oleh ASN Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain disebabkan :
   a. Posisi layanan berada di lantai 3, dan fasilitas *lift* kurang maksimal (sering mengalami kendala teknis) sehingga mengurangi tingkat kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian.
   b. Belum adanya ruang runggu yang representati bagi ASN.

Berdasarkan kendala tersebut di atas maka rekomendasi pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Membuat Standar Pelayanan untuk setiap jenis layanan kepegawaian yang dikeluarkan oleh BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Melakukan evaluasi dan revisi SOP layanan kepegawaian;
3. Memberikan kesempatan dalam peningkatan kompetensi terkait *Service Excellent;*
4. Mengoptimalkan fungsi website BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Peremajaan data ASN secara berkala (setiap ada perubahan data ASN);
6. Meningkatkan peran atasan langsung dalam memverifikasi dokumen layanan kepegawaian;
7. Meningkatkan kompetensi teknis bagi pejabat pelaksana; dan
8. Mengusulkan anggaran untuk membangun ruang tunggu yang representatif bagi ASN.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Terbentuknya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara dikarenakan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah berubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut BKPSDM), Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 atas Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Lebih lanjut penjelasan mengenai tugas dan fungsi BKPSDM diuraikan bahwa BKPSDM melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan sebagai berikut :

Tujuan	:	Meningkatnya Profesionalitas ASN Kutai Kartanegara.
Sasaran	:	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah.

Target sasaran pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah dapat diuraikan sebagaimana tabel II.3 (T-C.30) berikut:

Tabel II.3 (T-C.30)

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BKPSDM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Indikator*)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD Tahun ke-					Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Indikator Tujuan BKPSDM												
1.	Indeks Profesionalitas ASN Kutai Kartanegara			61	65	70	75	80	42,45	54,94	70	75	Target kinerja tidak tercapai
	Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM setingkat *Impact*												
1.	Indeks Kepuasaan ASN terhadap pelayanan BKPSDM			80	82	85	87	89	76,33	84,54	85	87	
	Indikator Kinerja Kunci												
1			Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	82	84	86	88	90	46,68	58,14	58,25	59,00	Target kinerja tidak tercapai
2			Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	16	18	20	55	24	10,51	10,11	10,11	11	Target kinerja tidak tercapai
3			Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	5	7	9	11	13	38,11	33,11	40	45	
	Indikator Kinerja Program												

	setingkat *Outcome*												
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			85	86	87	88	89	84,94	92,70	87	88	
2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara			92	93	94	95	96	89,13	99,97	94	95	
3	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional			18,38	20,65	22,64	24,64	26,64	22,76	29,64	22,64	24,64	
	Indikator Kinerja Kegiatan												
1	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24	23	24	23	23	19	20	24	23	
2	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			15	15	15	15	15	12	15	15	15	
3	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			2	2	2	2	2	1	2	2	2	
4	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			1	2	2	3	2	1	1	2	3	
5	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			7	7	8	8	8	7	7	8	8	
6	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	
8	Jumlah Barang Milik Daerah			12	12	12	12	12	16	12	12	12	
9	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan			1058	1147	1262	1365	1306	645	3183	1262	1365	
10	Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan			2790	2928	2583	2495	2473	8143	2568	2583	2495	Target kinerja tidak tercapai

11	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi			560	560	560	360	360	322	749	560	360	
12	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya			13084	12607	12093	11491	10854	11438	8540	12093	11491	Target kinerja tidak tercapai
13	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis			210	200	200	200	200	280	610	200	200	
14	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional			120	122	112	106	112	116	502	112	106	

2.3 Isu –Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis bidang kepegawaian yaitu:

a. Optimalisasi pengelolaan informasi kepegawaian;
b. Penataan ASN sesuai dengan formasi;
c. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan standar pelayanan;
d. Pelaksanaan mutasi, promosi dan pengembangan karier sesuai dengan pola karier dan formasi PNS;
e. Optimalisasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi aparatur;
f. Teridentifikasinya kesenjangan kompetensi aparatur;
g. Optimalisasi penegakan disiplin, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; dan
h. Peningkatan tata kelola dan kinerja BKPSDM.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Renstra BKPSDM Tahun 2025

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra BKPSDM dan tingkat kinerja yang dicapai oleh BKPSDM dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan setiap perangkat daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Pada awal tahun 2025, BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara menerima 2 (dua) buah gedung yang berlokasi di Kecamatan Tenggarong Seberang yang akan difungsikan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan. Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana gedung-gedung tersebut, BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara memerlukan anggaran yang cukup besar. Beberapa komponen sarana dan prasarana yang perlu dipertimbangkan untuk dialokasikan anggarannya antara lain pemeliharaan/perawatan gedung, pengadaan peralatan dan perlengkapan pembelajaran, fasilitas

teknologi informasi, fasilitas pelatihan khusus, pengadaan bahan dan alat pembelajaran serta pengelolaan dan pemeliharaan rutin.

Pada tahun 2025 BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara juga akan mengembangkan layanan berbasis digital yang terintegrasi dengan Simpeg Idaman yang diharapkan akan memberikan banyak manfaat bagi efisiensi dan kualitas layanan kepegawaian. Integrasi dengan Simpeg Idaman dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen data pegawai hingga administrasi kepegawaian.

Untuk penguatan manajemen kinerja berbasis sistem merit, BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara akan mengoptimalkan pengembangan kompetensi ASN berdasarkan kebutuhan perangkat daerah, melaksanakan penilaian kompetensi bagi pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional serta mengoptimalkan manajemen talenta.

Rincian kebutuhan anggaran pada tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana Tabel TC.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara dibawah ini:

Tabel TC-31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Rancangan Awal RKPD/Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	UNSUR PENUNJANG FUNGSI PEMERINTAHAN						UNSUR PENUNJANG FUNGSI PEMERINTAHAN						
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Sakip	87	Nilai	52.799.638.514,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Sakip	88	Nilai	15.633.331.188,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Dokumen	185.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23	Dokumen	1.000.000.000,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	65.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	450.000.000,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	5	Laporan	55.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	5	Laporan	50.000.000,00	

			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	65.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	150.000.000,00	
4							Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000,00	
5							Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	Data	250.000.000,00	
6							Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Berita Acara	50.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15	Laporan	14.098.766.102,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15	Laporan	11.242.915.948,00	

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1190	Orang/ bulan	13.928.766.102,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1260	Orang/ bulan	11.092.915.948,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	50.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	25.000.000,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	Laporan	120.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	100.000.000,00	Penyesuaian besaran honorarium pengelola keuangan terhadap pagu anggaran yang dikelola Perangkat Daerah
4							Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kukar	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Laporan	25.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	2	Dokumen	44.840.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	2	Dokumen	30.000.000,00	

			(BMD) pada Perangkat Daerah									
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	44.840.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	30.000.000,00	Penyesuaian kebutuhan riil
							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	25.000.000,00	
							Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	50.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2	Dokumen	415.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	3	Dokumen	240.000.000,00	
8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kukar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	240.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kukar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	140.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kab. Kukar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	30	Orang	75.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kukar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan	30	Orang	50.000.000,00	Penyesuaian terhadap Standar

	Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				Biaya Umum yang berlaku
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	100.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	50.000.000,00	Penyesuaian terhadap Standar Biaya Umum yang berlaku
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	Layanan	1.575.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	Layanan	1.436.000.000,00	
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	250.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	150.000.000,00	Pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan Gedung DIKLAT BKPSDM
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	150.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	150.000.000,00	
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kukar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	250.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kukar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	200.000.000,00	kebutuhan operasional kantor dan Gedung DIKLAT BKPSDM

14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	127	Dokumen	21.000.000,00	Sub kegiatan tidak dibutuhkan
15	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	Paket	150.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	Paket	75.000.000,00	Penyesuaian kebutuhan riil
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	125.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	125.000.000,00	
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	400.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	315.000.000,00	Pemenuhan kebutuhan terkait peningkatan frekuensi rapat koordinasi dengan instansi pusat/kementerian
18	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	450	Dokumen	100.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	450	Dokumen	100.000.000,00	
19	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	1	Dokumen	150.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	1	Dokumen	300.000.000,00	Pengelolaan website BKPSDM dan

			Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						Berbasis Elektronik pada SKPD				pelaksanaan fungsi PPID Pembantu
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	30.990.519.600,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10	Persen	100.000.000,00	
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	196	Unit	28.689.711.600,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit		Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana belajar untuk gedung diklat BKPSDM
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	264	Unit	2.300.808.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	nit	100.000.000,00	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung untuk gedung diklat BKPSDM
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	12	Bulan	4.153.142.812,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	12	Bulan	1.119.415.240,00	

			Pemerintahan Daerah yang disediakan						Pemerintahan Daerah yang disediakan				
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	22.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	22.000.000,00	
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	3.119.330.560,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	170.000.000,00	Pemenuhan kebutuhan pembayaran rekening listrik, air dan speedy (indihome) untuk gedung diklat BKPSDM
25	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	167.290.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	aporan	100.000.000,00	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor diklat BKPSDM
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	844.522.252,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	827.415.240,00	Pemenuhan kebutuhan Tenaga Kebersihan dan Tenaga

													Keamanan Gedung Diklat BKPSDM
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	12	Unit	1.337.370.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	12	Unit	325.000.000,00	
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit	325.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit	325.000.000,00	
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Paket	1.012.370.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Paket		Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor dan Bangunan Gedung DIKLAT BKPSDM di Tenggarong Seberang

							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	65.000.000,00	
	Program Kepegawaian Daerah		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	94	Persen	10.690.000.000,00	Program Kepegawaian Daerah		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	95	Persen	8.290.000.000,00	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	1365	ASN	2.050.000.000,00	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	1365	ASN	2.050.000.000,00	
29	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan Kebutuhan ASN untuk 59 Perangkat Daerah
30	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	Dokumen	450.000.000,00	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	Dokumen	450.000.000,00	
31	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi	1	Dokumen	100.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi	1	Dokumen	100.000.000,00	

			Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				
32	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Kab. Kukar	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	Lembaga	500.000.000,00	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Kab. Kukar	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	Lembaga	500.000.000,00	
33	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	650.000.000,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	650.000.000,00	Digitalisasi seluruh layanan kepegawaian BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara
34	Pengelolaan data Kepegawaian	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	Dokumen	100.000.000,00	Pengelolaan data Kepegawaian	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	Dokumen	100.000.000,00	
35	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Laporan	150.000.000,00	Evaluasi Data,Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Laporan	150.000.000,00	Pelaksanaan evaluasi data 59 Perangkat Daerah
	Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan	2495	ASN	625.000.000,00	Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan	2495	ASN	625.000.000,00	
36	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan	1	Dokumen	225.000.000,00	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1	Dokumen	225.000.000,00	Menindaklanjuti perubahan nomenklatur Jabatan Pelaksana

			Mutasi ASN antar Daerah										sesuai Permenpan RB No.45 Tahun 2022
37	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN	Kab. Kukar	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1	Dokumen	200.000.000,00	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN	Kab. Kukar	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1	Dokumen	200.000.000,00	
38	Pengelolaan promosi ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	Dokumen	200.000.000,00	Pengelolaan promosi ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	Dokumen	200.000.000,00	
	Pengembangan kompetensi ASN		Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi		ASN	6.650.000.000,00	Pengembangan kompetensi ASN		Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi	360	PNS	4.250.000.000,00	
39	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	600	Orang	2.200.000.000,00	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	600	Orang	1.250.000.000,00	Mandatory spending pengembangan kompetensi SDM aparatur
40	Pengelolaan Assessment Center	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	3	Dokumen	2.950.000.000,00	Pengelolaan Assesment Center	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	3	Dokumen	1.500.000.000,00	Seleksi JPTP, Assesment Pejabat Ess III, IV dan Pejabat Fungsional serta optimalisasi

													Manajemen Talenta
41	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	50	Orang	1.500.000.000,00	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100	Orang	1.500.000.000,00	Beasiswa PNS Tugas Belajar, Beasiswa Kukar Idaman, Beasiswa Tematik ASN Memenuhi Kebutuhan Kesenjangan kualifikasi Pendidikan dan Jabatan ASN Berdasarkan Analisa Jabatan dan Beban Kerja
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	11491	ASN	1.365.000.000,00	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	11491	ASN	1.365.000.000,00	

42	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	100.000.000,00	
43	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	850.000.000,00	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	850.000.000,00	Sosialisasi Manajemen ASN
44	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Laporan	75.000.000,00	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Laporan	75.000.000,00	
45	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	348	Orang	90.000.000,00	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	348	Orang	90.000.000,00	
46	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	Laporan	200.000.000,00	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	Laporan	200.000.000,00	Sosialisasi peraturan penegakan disiplin ASN
47	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	35	Dokumen	50.000.000,00	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	30	Dokumen	50.000.000,00	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis,	24,64	Persen	11.170.000.000,00	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	24.64	Persen	8.820.000.000,00	

			manajerial dan fungsional										
	Pengembangan kompetensi Teknis		Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	800	ASN	5.350.000.000,00	Pengembangan kompetensi Teknis		Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	200	ASN	3.000.000.000,00	
48	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	800	Orang	5.350.000.000,00	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	550	Orang	3.000.000.000,00	Mandatory spending pengembangan SDM berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah
	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional		Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	635	ASN	5.820.000.000,00	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional		Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	106	ASN	5.820.000.000,00	
49	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	90	orang	1.000.000.000,00	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	90	Orang	1.000.000.000,00	1. Mandatory spending pengembangan kompetensi

													SDM aparatur
50	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5	Laporan	4.820.000.000,00	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5	Laporan	4.820.000.000,00	Mandatory spending pengembangan SDM berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah
	JUMLAH					74.659.638.514,00	JUMLAH					32.228.331.188,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2025, tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Pasal 2 dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sehingga tidak mengakomodir usulan program dan kegiatan masyarakat.

Tabel II-5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Tidak ada

Tabel T-C.32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2023

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Dearah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Secara spesifik program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis merupakan upaya untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sinkronisasi antara program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran dan tujuan. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2021-2026, dalam implementasinya tidak dapat dipisahkan dari norma, peraturan perundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pembinaan aparatur sipil negara yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, secara nasional juga memiliki hubungan yang signifikan dengan dokumen Rencana Strategis kementerian/kelembagaan.

Telaahan strategis berdasarkan Rencana Strategis terhadap 4 (empat) kementerian/kelembagaan adalah sebagai berikut:

A. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.

Sebagai lembaga pembina Aparatur Sipil Negara Kementerian PAN-RB memiliki visi “Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong” dan misi “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya”. Hal ini dicapai dengan tujuan strategis, yaitu:

a. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik - *digital bureaucracy*;
b. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global;
c. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel;
d. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas;
e. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani;
f. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Tujuan strategi ini dicapai dengan strategi percepatan reformasi birokrasi, yaitu:

a. Penguatan implementasi manajemen ASN;
b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis;
c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja; dan
d. Transformasi pelayanan publik.

Paparan diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara program Kementerian PAN-RB dengan program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kukar, yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program pelayanan administrasi Aparatur Sipil Negara.

B. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;

Badan Kepegawaian Negara (BKN), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian negara. Visi yang ingin diwujudkankan oleh BKN adalah “Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong” untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, netral dan sejahtera. Visi tersebut dicapai melalui 5 (lima) misi, yaitu:

a. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN;
b. Penyelenggaraan manajemen ASN;
c. Penyimpanan informasi pegawai ASN;
d. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN; dan
e. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal Badan Kepegawaian Negara.

Selanjutnya mempedomani Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2021-2026 dalam hal kebijakan pembangunan di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut:

a. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, melalui peningkatan profesionalisme, netralitas, dan kesejahteraan sumber daya manusia aparatur;
b. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi dan pemberdayaan sumber daya manusia aparatur.

Gambaran diatas memberikan arah dalam dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara. Program dan kegiatan yang dimuat dalam Rencana Strategis, merupakan penjabaran dan tindaklanjut dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara, yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program pelayanan administrasi Aparatur Sipil Negara dan program peningkatan kesejahteraan aparatur.

C. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;

Lembaga Administrasi Negara (LAN), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LAN bertugas untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara serta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil. Visi yang ingin diwujudkan LAN adalah "Sebagai Institusi Pembelajar Berkelas Dunia yang Mampu menjadi Penggerak Utama dalam mewujudkan World Class Government Untuk Mendukung Visi Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Sedangkan misi adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui:

a. Mewujudkan SDM Aparatur unggul melalui kebijakan, pembinaan, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang berstandar internasional;
b. Mewujudkan Kebijakan Administrasi Negara yang berkualitas melalui kajian kebijakan berbasis evidence dan penyediaan analis kebijakan yang kompeten;
c. Mewujudkan Inovasi Administrasi Negara yang berkualitas melalui pengembangan model inovasi serta penguatan kapasitas dan budaya inovasi;
d. Memujudkan organisasi pembelajar berkinerja tinggi melalui dukungan pelayanan yang berkualitas dan berbasis elektronik.

Dengan mengacu pada rencana strategis LAN diketahui bahwa program dan kegiatan peningkatan program pendidikan kedinasan Aparatur Sipil Negara dan program pembinaan dan pengembangan Aparatur dalam rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kukar, mempedomani pembinaan pelaksanaan pendidikan aparatur negara yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

D. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang merupakan salah satu unit organisasi dari Kementerian Dalam Negeri, memiliki visi “Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang Kompeten dan Profesional” yang dicapai melalui 3 (tiga) misi yaitu:

a. Meningkatkan Standar Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri;
b. Menyelenggarakan Sertifikasi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri;
c. Mengembangkan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri.

Berdasarkan telaahan lingkungan strategis dari 4 (empat) Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga sebagaimana dipaparkan diatas, maka dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan kepegawaian, serta mendukung arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat di bidang aparatur maka isu-isu strategis ditingkat Pemerintah Pusat atau nasional yang terkait dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

a. Optimalisasi pengelolaan informasi kepegawaian;
b. Penataan ASN sesuai dengan formasi;
c. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan standar pelayanan;
d. Pelaksanaan mutasi, promosi dan pengembangan karier sesuai dengan pola karier dan formasi PNS;
e. Optimalisasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi aparatur;
f. Teridentifikasinya kesenjangan kompetensi aparatur;
g. Optimalisasi penegakan disiplin, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; dan
h. Peningkatan tata kelola dan kinerja BKPSDM.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 1(satu) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh BKPSDM untuk kurun waktu 5 (lima)

tahun sampai Tahun 2026.

Sementara itu, sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya Profesionalitas ASN Kutai Kartanegara.

Sasaran dari tujuan tersebut yaitu : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah.

Tujuan dan sasaran renja BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel III-1

Tujuan dan Sasaran Renja

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN		TARGET RENJA TAHUN 2025
	URAIAN	INDIKATOR	
Meningkatnya Profesionalitas ASN Kutai Kartanegara			75
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasaan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	87

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
2. Pencapaian tujuan BKPSDM untuk meningkatkan profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah;
4. Penguatan manajemen kinerja BKPSDM berbasis sistem merit; dan
5. Penyelenggaraan pengembangan PNS berdasarkan kebutuhan organisasi perangkat daerah.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2025 ini, BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan 3 (tiga) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan dengan jumlah total pagu indikatif sebesar Rp. 32.228.331.188,00.

Kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 sebagian besar dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya Tenggarong, kecuali untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum dan Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan yang dilaksanakan di luar Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain di Samarinda bekerja sama dengan LAN Samarinda dan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, Makassar, Yogyakarta, Surabaya, Malang dan Jakarta.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 difokuskan untuk mendukung program kerja Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam program dedikasi KUKAR IDAMAN. Dalam upaya mendukung program dedikasi tersebut, BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat amanat untuk melaksanakan Program Aparatur Negara Bahagia dan Program Digitalisasi Pelayanan Publik.

BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara diberi amanat sebagai salah satu perangkat daerah yang mengampu Program Digitalisasi Pelayanan Publik yang ditujukan untuk membangun mindset dan culturset tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi. Dalam program ini peranan BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menempatkan aparatur sesuai kebutuhan perangkat daerah sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Program dan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2025 disusun secara sistematis untuk menjawab isu-isu strategis dengan skala prioritas agar tujuan dan sasaran strategis dapat diwujudkan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan profesionalitas ASN di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara diperlukan upaya, kerja keras dan sinergitas dari seluruh perangkat daerah, mengingat saat ini nilai indeks profesionalitas ASN masih sangat rendah. Upaya pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM telah tercermin dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun.

Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegera dapat dilihat pada Tabel IV-1

Tabel T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. KUTAI KARTANEGARA

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.03	KEPEGAWAIAN								
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip		88 Nilai	15.118.331.188,00			89 Nilai	13.792.806.535,00
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		23 Dokumen	650.000.000,00			23 Dokumen	185.000.000,00
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kukar	3 Dokumen	450.000.000,00	APBD		6 Dokumen	65.000.000,00
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kukar	5 Laporan	50.000.000,00	APBD		15 Dokumen	55.000.000,00
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kukar	1 Laporan	150.000.000,00	APBD		2 Dokumen	65.000.000,00

5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		15	Laporan	11.217.915.948,00			15	Laporan	10.494.641.295,00
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1260	Orang/ bulan	11.092.915.948,00	APBD		1080	Orang	10.344.641.295,00
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kukar	1	Laporan	25.000.000,00	APBD		1	Laporan	50.000.000,00
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kukar	12	Laporan	100.000.000,00	APBD	Penyesuaian besaran honorarium pengelola keuangan terhadap pagu anggaran yang dikelola Perangkat Daerah	12	Laporan	100.000.000,00
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		2	Dokumen	30.000.000,00			2	Dokumen	45.000.000,00
5.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kukar	2	Laporan	30.000.000,00	APBD	Penyesuaian kebutuhan riil	2	Laporan	45.000.000,00
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		3	Dokumen	240.000.000,00			2	Dokumen	100.000.000,00

5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kukar	1	Paket	140.000.000,00	APBD	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan			-
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kukar	30	Orang	50.000.000,00	APBD	Penyesuaian terhadap Standar Biaya Umum yang berlaku	30	Orang	50.000.000,00
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kukar	50	Orang	50.000.000,00	APBD	Penyesuaian terhadap Standar Biaya Umum yang berlaku	50	Orang	50.000.000,00
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		8	Layanan	1.436.000.000,00			8	Layanan	1.136.000.000,00
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kukar	1	Paket	150.000.000,00	APBD	Pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan Gedung DIKLAT BKPSDM	37	Jenis	150.000.000,00
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kukar	3	Paket	150.000.000,00	APBD		4500	Porsi	150.000.000,00

5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kukar	3	Paket	200.000.000,00	APBD	kebutuhan operasional kantor dan Gedung DIKLAT BKPSDM	31 74 39	Unit	200.000.000,00
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kukar	12 7	Dokumen	21.000.000,00	APBD	Sub kegiatan tidak dibutuhkan	12 77	Buku	21.000.000,00
5.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Kukar	2	Paket	75.000.000,00	APBD	Penyesuaian kebutuhan riil	2	Jenis	75.000.000,00
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kukar	1	Laporan	125.000.000,00	APBD		5	Orang	125.000.000,00
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kukar	1	Laporan	315.000.000,00	APBD	Pemenuhan kebutuhan terkait peningkatan frekuensi rapat koordinasi dengan instansi pusat/kementerian	10 0	Rapat	315.000.000,00
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kukar	45 0	Dokumen	100.000.000,00	APBD		45 0	Berkas	100.000.000,00

5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kukar	1	Dokumen	300.000.000,00	APBD	Pengelolaan website BKPSDM dan pelaksanaan fungsi PPID Pembantu			-
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		10	Persen	100.000.000,00			100	Persen	387.750.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kukar		Unit		APBD	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana belajar untuk gedung diklat BKPSDM			
5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kukar	1	nit	100.000.000,00	APBD	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung untuk gedung diklat BKPSDM	1	Paket	100.000.000,00

5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12	Bulan	1.119.415.240,00			12	Bulan	1.119.415.240,00
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kukar	1	Laporan	22.000.000,00	APBD		12	Bulan	22.000.000,00
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kukar	12	Laporan	170.000.000,00	APBD	Pemenuhan kebutuhan pembayaran rekening listrik, air dan speedy (indihome) untuk gedung diklat BKPSDM	12	Bulan	170.000.000,00
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kukar	1	aporan	100.000.000,00	APBD	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor diklat BKPSDM	12	Bulan	100.000.000,00
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kukar	12	Laporan	827.415.240,00	APBD	Pemenuhan kebutuhan Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan	12	Bulan	827.415.240,00

								Gedung Diklat BKPSDM			
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah		12	Unit	325.000.000,00			12	Unit	325.000.000,00
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kukar	12	Unit	325.000.000,00	APBD		12	Unit	325.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kukar		Paket		APBD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor dan Bangunan Gedung DIKLAT BKPSDM di Tenggarong Seberang		Paket!	
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara		95	Persen	8.290.000.000,00			96	Persen	3.215.000.000,00
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan		1365	ASN	2.050.000.000,00			1306	ASN	1.325.000.000,00
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah	Kab. Kukar	1	Dokumen	100.000.000,00	APBD	Penyusunan Kebutuhan ASN untuk	1	Dokumen	75.000.000,00

		Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						59 Perangkat Daerah			
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Kukar	1	Dokumen	450.000.000,00	APBD		661	ASN	450.000.000,00
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Kukar	1	Dokumen	100.000.000,00	APBD		645	SK	100.000.000,00
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kab. Kukar	1	Lembaga	500.000.000,00	APBD		1142	ASN	500.000.000,00
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kukar	1	Dokumen	650.000.000,00	APBD	Digitalisasi seluruh layanan kepegawaian BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara			-
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Kukar	1	Dokumen	100.000.000,00	APBD		2999	Data	100.000.000,00
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kukar	1	Laporan	150.000.000,00	APBD	Pelaksanaan evaluasi data 59 Perangkat Daerah	70	Buku	100.000.000,00
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan		2495	ASN	625.000.000,00			2473	ASN	525.000.000,00

5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kab. Kukar	1	Dokumen	225.000.000,00	APBD	Menindaklanjuti perubahan nomenklatur Jabatan Pelaksana sesuai Permenpan RB No.45 Tahun 2022	316	SK	125.000.000,00
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Kukar	1	Dokumen	200.000.000,00	APBD		2007	SK	200.000.000,00
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Kukar	1	Dokumen	200.000.000,00	APBD		150	ASN	200.000.000,00
5.03.02.2.03	Pengembangan kompetensi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi		360	PNS	4.250.000.000,00			360	PNS	825.000.000,00
5.03.02.2.03.01	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Kab. Kukar	600	Orang	1.250.000.000,00	APBD	Mandatory spending pengembangan kompetensi SDM aparatur	180	ASN	100.000.000,00
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Kab. Kukar	3	Dokumen	1.500.000.000,00	APBD	Seleksi JPTP, Assesment Pejabat Ess III, IV dan Pejabat Fungsional serta	80	ASN	350.000.000,00

								optimalisasi Manajemen Talenta			
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kab. Kukar	100	Orang	1.500.000.000,00	APBD	Beasiswa PNS Tugas Belajar, Beasiswa Kukar Idaman, Beasiswa Tematik ASN Memenuhi Kebutuhan Kesenjangan kualifikasi Pendidikan dan Jabatan ASN Berdasarkan Analisa Jabatan dan Beban Kerja	100	ASN	375.000.000,0
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya		11491	ASN	1.365.000.000,00			10854	ASN	540.000.000,0

5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	1	Dokumen	100.000.000,00	APBD		1	Dokumen	100.000.000,0
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	1	Dokumen	850.000.000,00	APBD	Sosialisasi Manajemen ASN	1085 4	ASN	125.000.000,0
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	1	Laporan	75.000.000,00	APBD		1	Dokumen	75.000.000,0
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Kab. Kukar	348	Orang	90.000.000,00	APBD		348	ASN	90.000.000,0
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Kukar	1	Laporan	200.000.000,00	APBD	Sosialisasi peraturan penegakan disiplin ASN	20	Kasus	100.000.000,0
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Kab. Kukar	30	Dokumen	50.000.000,00	APBD		30	Surat	50.000.000,0
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional		24.64	Persen	8.820.000.000,00			26.64	Persen	2.130.000.000,0
5.04.02.2.01	Pengembangan kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis		200	ASN	3.000.000.000,00			200	ASN	400.000.000,0
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kab. Kukar	550	Orang	3.000.000.000,00	APBD	Mandatory spending pengembangan SDM berdasarkan kebutuhan	200	Peserta	400.000.000,0

	Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum							Perangkat Daerah			
5.04.02.2.02	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional		106	ASN	5.820.000.000,00			112	ASN	1.730.000.000,0
5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	90	Orang	1.000.000.000,00	APBD	1. Mandatory spending pengembangan kompetensi SDM aparatur	12	ASN	230.000.000,0
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Kukar	5	Laporan	4.820.000.000,00	APBD	Mandatory spending pengembangan SDM berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah	100	Peserta	1.500.000.000,0
	JUMLAH					32.228.331.188,00					19.137.806.535,0

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja adalah menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan yang disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

a. Catatan Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting sebagai pedoman untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024, menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur, yang selanjutnya akan dikompilasikan di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pencapaian Visi dan Misi Daerah dapat terwujud dengan menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah, maka unsur-unsur organisasi mulai dari Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh pelaksana BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :

1. Melaksanakan Rencana Kerja BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
2. Menjaga konsistensi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kutai Kartanegara dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dari dokumen Rencana Kerja BKPSDM Kab. Kukar Tahun 2024 adalah akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2025 dengan

memperhatikan saran, informasi dan data-data dari masing-masing bidang untuk melakukan penyempurnaan sehingga mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Perangkat Daerah maupun di lingkup daerah.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini dibuat untuk menjadi acuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 dengan harapan agar dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dapat menjadi panduan yang efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

e.RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau Hipotesis di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Pengembangan adalah Kegiatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bertujuan memanfaatkan Kaidah dan teori Ilmu Pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi Ilmu Pengetahuan yang telah ada.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 2010 Tentang Komite Inovasi Nasional bahwa mengamanatkan kebijakan inovasi nasional di Indonesia perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi dalam satu kesatuan system inovasi nasional guna meningkatkan produktifitas nasional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa.

Sesuai Pasal 219 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Litbang daerah di arahkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama dibidang peneltian dan pengembangan guna membantu kepala daerah dalam perumusan kebijakan/regulasi, penyelenggaraan inovasi daerah, pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Inovasi adalah kegiatan peneltian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengtahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Pasal 386 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa dalam rangka Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah,Pemerintah Daerah dapat melakukan Inovasi sebagai upaya meningkatkan daya saing. Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat berasal dari Kepala Daerah, Anggota DPRD Kabupaten, Aparatur Sipil Negara, Perangkat Daerah dan anggota masyarakat. Kemudian di Pasal 386 sampai dengan Pasal 390 menyatakan bahwa Brida sebagai pelaksana teknis yang membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan Pelaksanaan Inovasi.

Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar Institusi Pemerintah Pemerintah Daerah, Lembaga Kelitbangan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penunjang Inovasi, Dunia Usaha, dan Masyarakat di Daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Badan Riset dan Inovasi Daerah menjabarkan Visi dan Misi serta arah Pembangunan pada Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Kerja (Renja) -PD Badan Riset dan Inovasi Daerah ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Selama 5 Tahun 2021-2026. Untuk mengantisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya.

Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten, Kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang Sosial Budaya, Ekonomi, Politik dan Keamanan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan , pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil Penelitian / Kajian.

Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi dan misi,

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai, dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik dan dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penelitian dan Pengembangan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

21. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara Periode 2021-2026.

b. Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

a. Mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara kedalam Rencana Kegiatan Pembangunan melalui Kutai Kartanegara IDAMAN.
b. Sebagai acuan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kutai Kartanegara sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan Misinya.
c. Merumuskan program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja)Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Program dan Kegiatan
BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD Tahun 2023 (n-1) merupakan tahun berjalan dengan tahun pembuatan rencana kerja tahun 2024 (n), sehingga realisasi capaian target Renja masih sebatas perkiraan. Evaluasi realisasi capaian target Renja ini juga melihat secara akumulatif dari tahun awal Renstra PD (n-1 dan n-2), untuk mengetahui tingkat keberhasilan realisasi target kinerja dari program-program dan kegiatan-kegiatan kerja yang telah direncanakan; Sehingga PD dapat mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan sebaliknya, selain itu juga dapat mengetahui program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang tepat untuk mengatasinya.

A. Realisasi program/kegiatan Tahun 2023 dan Tahun 2024

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kendala kegiatan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pengukuran tersebut merupakan hasil suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator masukan (input), Keluaran (output) dan hasil (outcome). Penilaian ini merupakan proses pengolahan masukan menjadi keluaran dan hasil terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Sebagai gambaran capaian kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan Brida Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2023 berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Pagu Anggaran BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2023 sebesar Rp. 14.773.174.485,- dan mengalami kenaikan pada anggaran perubahan (APBD-P) sebesar Rp18.291.226.889,- dan menjadi sebesar Rp33.064.401.374,- Adapun Realisasi keuangan program/kegiatan Brida Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebesar Rp30.422.355.033 (92.33 %) dan Realisasi Fisik (100 %).

Secara umum capaian kinerja program/kegiatan BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 hingga penyusunan dokumen Renja PD Tahun 2025 ini berjalan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah di tetapkan sebagai berikut:

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)
Uraian Sub Kegiatan		19.463.801.374,-	17.618.079.528,-	90.52	100
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	270.000.000,-	250.793.460,-	92.89	100
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.603.651.091,-	7.515.826.299,-	87.36	100
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	90.000.000,-	87.740.759,-	97.49	100
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah	905.000.000,-	653.216.773,-	72.18	100
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.588.205.712,-	6.316.585.502,-	95.88	100
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	1.989.000.000,-	1.915.455.000,-	96.30	100
7	Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	847.944.571,-	725.213.793,-	85.53	100
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	170.000.000,-	153.247.942,-	90.15	100

b. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)
Uraian Sub Kegiatan		*13.600.600.000.-*	*12.804.275.505,-*	*94.14*	*100*
1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaran Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.422.230.000,-	5.315.384.311,-	98.03	100

2	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Kemasyarakatan	1.965.000.000,-	1.879.176.707,-	95.63	100
3	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan	3.432.640.000,-	3.052.893.311,-	88.94	100
4	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Tehnologi	2.780.730.000,-	2.556.821.176,-	91.95	100

B. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Secara umum target kinerja pada tahun anggaran 2023 tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan walaupun terdapat kendala pada proses pelaksanaan kegiatan belanja langsung pada Badan Riset dan Inovasi Daerah yang mengakibatkan target waktu yang telah ditetapkan selama 6 bulan tidak sesuai lagi, maka akhirnya seluruh kegiatan berakhir pada bulan Desember 2023.

A. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD. Berdasarkan target capaian program sesuai dengan Renstra Brida tahun 2021 – 2026 maka pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan target 100 % (Realisasi Fisik) dan 92.01 % (Realisasi Keuangan). Berdasarkan target capaian program pada Renstra tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 secara umum telah memenuhi target capaian program pada Renstra Brida Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Faktor yang mempengaruhi capaian kinerja program / kegiatan adalah pengalokasian anggaran kegiatan harus melihat kebutuhan anggaran yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat meningkatkan kualitas dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan selama satu tahun dalam tahun perencanaan (n-1).

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024) maka dibuat tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD tahun 2021 – 2026 (Tabel Terlampir Tabel T-C. 29).

Tabel TC. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2023

Kabupaten Kutai Kartanegara

					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	arget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
									Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	95	62.65	84	90.45	108%	87 (A)	90.45	95%
5	05	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55	22	11	11	100%	11	44	80%
5	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	4	2	2	100%	2	8	80%

5	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40	16	8	8	100%	8	32	80%
5	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	2	1	1	100%	1	4	80%
5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	35	14	7	7	100%	7	28	80%
5	05	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5450	2092	1090	1002	92%	1090	4184	77%
5	05	01	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	30	12	6	6	100%	6	24	80%
5	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	35	14	7	7	100%	7	28	80%

					Daerah	(BMD) pada Perangkat Daerah								
5	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	30	12	6	6	100%	6	24	80%
5	05	01	2.03	06	Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	5	2	1	1	100%	1	4	80%
5	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	30	12	6	6	100%	6	24	80%
2	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	32	10	4	40%	10	46	92%
2	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25	10	5	5	100%	5	20	80%
5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan administrasi umum	35	14	7	7	100%	7	28	80%
5	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	75	30	2	2	100%	31	63	84%

5	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55	32	2	2	100%	11	45	82%
5	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16	8	3	3	100%	4	15	94%
5	05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10	0	2	2	100%	2	4	40%
5	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2145	849	429	420	98%	256	1525	71%
5	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	185	74	37	37	100%	37	148	80%
5	05	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	2	1	1	100%	1	4	80%
5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60	24	12	12	100%	12	48	80%

5	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	240	96	48	48	100%	48	192	80%
5	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1920	768	384	384	100%	384	1536	80%
5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	1215	487	243	243	100%	243	973	80%
5	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	160	58	31	26	84%	31	115	72%
5	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1060	424	212	212	100%	212	848	80%

5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase penelitian danpengembangan yangtermanfaatkan olehPerangkat Daerah bidangPenyelenggaraan Pemerintahan danPengkajian Peraturan	100	100	100	100	100%	100	100	100
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	7	13	28	28	100%	16	57	814%
5	05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1	3					3	300%
5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1	6	3	3	100%	3	12	1200%

5	05	02	2.01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1		1	1	100%	2	3	300%
5	05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1	3					3	300%
5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	0		3	3	100%	3	6	600%
5	05	02	2.01	07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	1							0%

5	05	02	2.01	11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian tentang pengembangan bidang badan usaha milik desa	1	1					1	100%
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik	0		2	2	100%	2	4	400%
5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	0		1	1	100%		1	100%
5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1		18	18	100%	6	24	2400%
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang	100	100	100	100	100%	100	100	100%

						Sosial Dan Kependudukan								
5	05	02	2.02		Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Sosial Dan Kependudukan	10	11	7	7	100%	13	31	310%
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1	1				1	2	200%
5	05	02	2.02	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0		2	2	100%	1	3	300%
5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan	1	1	1	1		2	4	400%
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1		1	1		1	2	200%

5	05	02	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	0					1	1	100%
5	05	02	2.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1					1	1	100%
5	05	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penelitian tentang pengembangan partisipasi masyarakat	5	9	3	3	100%	6	18	360%
5	05	02	2.02	11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	1							0%
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5	4	9	9	100%	1	14	280%

5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	1	1	1	100%	2	4	400%
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	1	1	1	100%	1	3	300%
5	05	02	2.03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1		1	1	100%		1	100%
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	2	4	4	100%	7	13	1300%
5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1					3	3	300%
5	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0		1	1	100%		1	100%

5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	0		1	1	100%		1	100%
5	05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1						0	0%
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi	100	100	100	100	100%	100	100	100%
5	05	02	2.04		Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Inovasi dan Teknologi	5	2	6	6	100%	10	18	360%
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1		3	3	100%	6	9	900%
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi	1							0%

						Inovasi dan Penerapan Teknologi								
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	2	1	1	100%	2	5	500%
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	1	1	1	100%	1	3	300%
5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1	1	1	1	100%	1	3	300%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Penyusunan Renstra PD mengacu pada Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Renstra PD diatur dengan Peraturan penyusunan Renstra Brida ini berpedoman pada Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan Arah Pembangunan Jangka Panjang Kutai Kartanegara 2005-2025 9 (sembilan) prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 Tentang RPJMD Tahun 2015-2019. Hal ini untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kebijakan Pembangunan Nasional.

Dalam kondisi umum, pencapaian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagai organisasi perangkat daerah dengan tolak ukur pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di tahun ke 3 (Tiga) Renstra Tahun 2021-2026 mempunyai dua sasaran (sasaran utama dan sasaran pendukung) dan dan indikator yaitu :

a. Meningkatnya kinerja Kelitbangan dalam penguatan inovasi daerah.
b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran ditetapkan berdasarkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah pada Tahun 2023. Keberhasilan pencapaian sasaran akan diketahui berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan bersamaan dengan penetapan sasaran telah terlaksana.

Adapun sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan Badan Riset dan Inovasi Daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kinerja Kelitbangan dalam penguatan inovasi daerah dengan Indi kator Indeks Inovasi Daerah.
b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Brida.

Dua sasaran dan indikator tersebut telah dijabarkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan dengan capaian kinerja yang dihasilkan Tahun ke 5 (lima) Renstra Tahun 2021-2026 sebagai berikut (Tabel Terlampir Tabel T-C. 30).

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Persentase Rekomendasi yang termanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai salah satu bahan penyusunan kebijakan daerah			28.6	33.4	100	100	100	28.6	33.3	100	100	100	adanya perubahan target pada indikator tujuan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan sudah menjadi kesepakatan bersama dengan Bappeda
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Indeks Inovasi Daerah			36.64	41.38	55.85	57	61	41.38	55.85	58.69	60.01	61	adanya perubahan target pada indikator sasaran ke-2 hasil evaluasi tahun sebelumnya dan sudah menjadi kesepakatan bersama dengan Bappeda
4	Nilai Sakip Perangkat Daerah			81	84	87	91	91	62.65	90.45	90.45	91	91	
5	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	
6	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	

7	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	

Tabel TC - 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

8	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			6 Dukumen	6 Dukumen	6 Dukumen	6 Dukumen	6 Dukumen	6 Dukumen	6 Dukumen	6 Dukumen	6 Dukumen	6 Dukumen	
9	Jumlah Pelayanan administrasi umum			7 Pelayanan	7 Pelayanan	7 Pelayanan	7 Pelayanan	7 Pelayanan	7 Pelayanan	7 Pelayanan	7 Pelayanan	7 Pelayanan	7 Pelayanan	
10	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			432 Orang / Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	397 Orang / Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
11	Jumlah Barang Milik Daerah			244 Unit	243 Unit	243 Unit	243 Unit	243 Unit	244 Unit	243 Unit	243 Unit	243 Unit	243 Unit	

12	Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
13	Jumlah Dokumen cakupan penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	9 Laporan	28 Laporan	15 Laporan	1 Laporan	
14	Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Sosial Dan Kependudukan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
15	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Sosial Dan Kependudukan			1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	10 Dokumen	7 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	

16	Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
17	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	9 Dokumen	15 Dokumen	1 Dokumen	
18	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
19	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Inovasi dan Teknologi			2 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	6 Dokumen	10 Laporan	1 Laporan	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

A. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD , Sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah bahwa Brida merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dibidang Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegera.

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Brida menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah Pelaksanaan Penelitian dan pengembangan di pemerintah daerah
3. Perencanaan, program, anggaran, kelembagaan dan sumber daya bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Riset dan Inovasi, kerjasama pembangunan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah.

5. Pelaksanaan program kerja di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah.
6. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah.
7. Penyusunan laporan rutin dan tahunan di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Invensi dn Inovasi di Daerah

B. Menentukan permasalahan dan hambatan pelaksanaan program dan kegiatan Renja PD, serta capaian kinerja Renstra PD tahun sebelumnya, yaitu :

1. Belum optimalnya ASN Brida dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
2. Belum Optimalnya jejaring atau kerjasama kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi / PD lainnya
3. Hasil kajian dan penelitian yang telah dilakukan oleh Brida belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh PD dan stakeholder lainnya.
4. Pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi tetapi pada umumnya belum maksimal dilaksanakan dalam sistim pengendalian
5. Setiap pemangku kegiatan jarang memperkiraan resiko yang akan terjadi apabila pekerjaan tersebut belum atau tidak dikerjakan.
6. Pimpinan melalui pertemuan atau pembinaanya melakukan pemantuan dilihat dari keberhasilan atau penyerapan anggaran yang telah dipergunakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

   Kurangnya Pemahaman terhadap penerapan SPIP dan Manfaatnya

C. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, capaian program nasional/ internasional, SPM dan MDGs.

Penyebab tidak tercapainya target kinerja utama dan belanja utama Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah akan berdampak kepada Internal maupun eksternal Badan Riset dan Inovasi Daerah , pada analisis risiko terdapat penyebab risiko dan skala risiko sehingga akan menghasilkan area dampak seperti Beban keuangan daerah, Penurunan reputasi, Sanksi pidana, perdata, dan/atau administrasi, Kecelakaan kerja, Ganggugan terhadap layanan organisasi dan Penurunan kinerja, dengan Level dampak seperti tidak signifikan (1), minor (2), moderat (3), signifikan (4), sangat signifikan (5).

Untuk mengetahui level dampak tersebut harus terlebih dahulu dilakukan evaluasi atas pengendalian intern yang telah dibuat seperti pada Surat Instruksi dan Surat Edaran Badan Riset dan Inovasi Daerah tersebut serta pengendalian yang lain yang mendukung atas evaluasi tersebut.

Dari berbagai opsi penanganan risiko yang telah dipilih memiliki dampak risiko seperti pada surat edaran Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah tersebut terdapat area dampak yang harus dilakukan rencana tindak pengendalian yang dibuatkan secara terpisah dari manajemen risiko.

Untuk mencapai tujuan dalam kegiatan dan capaian tujuan organisasi terhadap pemenuhan target yang diperjanjikan perlu dikomunikasi dan dikonsultasikan antar kegiatan dan pimpinan, komunikasi dan konsultasi tersebut dapat berupa :

1. Rapat berkala ;
2. Rapat insidentil ;
3. *Focused group discussion* ; dan
4. Forum pengelola risiko.
5. Pelaksanaan Pra seminar Hasil dan Seminar Hasil:
    a) Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Pemerintah Daerah :*Good governance*yang merupakan amanah yang harus dilaksanakan dan implementasikan kepada wujud pelaksanaan yang lebih nyata dan bertanggungjawab;
    b) Tuntutan Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih 2021-2026 yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026;

c) Tuntutan *stakeholders* terhadap publikasi hasil litbang;
d) Dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang belum optimal;
e) Hasil-hasil / *outcome* penelitian yang belum diimplementasikan oleh PD yang ada;
f) Belum tersedianya laboratorium iptek dan riset litbang daerah;

D. Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Pemerintah Daerah :
1. Program dan kegiatan dibidang kelitbangan daerah kedepan dapat dijadikan salah satu dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
2. Program dan kegiatan dibidang kelitbangan daerah kedepan dapat dijadikan salah satu dasar pengambilan kebijakan peningkatan Standar Pelayanan Minimal khususnya dibidang kelitbangan daerah.
3. Program dan kegiatan dibidang kelitbangan daerah kedepan dapat dijadikan salah satu dasar pengambilan kebijakan peningkatan pelayanan pemerintah daerah.

E. Formulasi Isu-isu penting berupa Rekomendasi dan catatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan.
1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
2. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan
4. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
5. Penelitian dan Pengembangan di Sub. Bidang Ekonomi Pembangunan
6. Penelitian dan pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
7. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
8. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal dan Renstra PD pada Tahun 2025

Rancangan awal RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja PD Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan PD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel; sehingga aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*.

Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan salah satu PD yang berperan strategis dalam pemberian rekomendasi terhadap pengambilan kebijakan pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program kegiatan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembangunan Kutai Kartanegara dapat dikatakan berhasil manakala pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa dan kecamatan juga mengalami perubahan yang nyata.

Akselerasi transformasi penelitian, kajian dan pengembangan di Badan Riset dan Inovasi Daerah akan menjadi suatu hal yang penting apabila dilihat dari keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi penelitian, kajian dan pengembangan di Badan Riset dan Inovasi Daerah membutuhkan sinergitas antara semua PD yang ada.Konsep sinergitas itu mutlak diperlukan manakala menilik alokasi anggaran untuk Badan Riset dan Inovasi Daerah sangat minim sementara program pembangunan yang teridentifikasi sangat banyak ragamnya.

Diperlukan kearifan pengambil kebijakan di level Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melihat Badan Riset dan Inovasi Daerah secara utuh demi peningkatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil telaah terhadap Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada (Tabel TC. 31 terlampir pada Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah).

Tabel TC. 31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

Badan Riset dan Inovasi Daerah

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	ndikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A		Nilai Sakip Perangkat Daerah	93	Nilai	11,924,800,317	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A		Nilai Sakip Perangkat Daerah	93 Nilai	13,857,717,695	
1.1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	Dokumen	270,000,000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	750,000,000	
							PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Laporan	50,000,000	Tambaahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD

							PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Laporan	50,000,000	Tambaahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	100,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	450,000,000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Brida	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	8	Laporan	100,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Brida	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50,000,000	

			Kinerja SKPD									
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	70,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	150,000,000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Brida	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	7	Dokumen	10,013,343,480	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Brida	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	9 Dokumen	10,978,510,858	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Brida	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76	Orang / Bulan	9,866,553,480	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Brida	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang / Bulan	10,781,720,858	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	25,000,000	Tambaahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD

									Keuangan Akhir Tahun SKPD			
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Brida	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	6	Laporan	146,790,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Brida	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD	6 Laporan	146,790,000	
							Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25,000,000	Tambaahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD

1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	7	Dokumen	90,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	4 Dokumen	105,000,000	
							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25,000,000	Tambaahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD
							Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50,000,000	Tambaahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD
1.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Brida	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	Laporan	50,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Brida	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	30,000,000	
1.3.2	Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	Brida	Jumlah Laporan Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	40,000,000	Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	Brida	Jumlah Laporan Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	-	Pengurangan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD

1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	6	Dokumen	155,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	155,000,000	
1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Brida	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	95,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Brida	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	95,000,000	
1.4.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Brida	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Orang	60,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Brida	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	60,000,000	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Pelayanan administrasi umum	7	Pelayanan	576,647,962	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Pelayanan administrasi umum	7 Pelayanan	576,647,962	
1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Brida	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	135,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Brida	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	135,000,000	
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Brida	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	2	Paket	124,450,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Brida	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	2 Paket	124,450,000	

			Disediakan						Disediakan			
1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Brida	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	30,002,325	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Brida	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	30,002,325	
1.5.4	Penyediaan Bahan/Material	Brida	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	Paket	45,883,637	Penyediaan Bahan/Material	Brida	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	45,883,637	
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Brida	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44	Laporan	149,992,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Brida	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88 Laporan	149,992,000	
1.5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Brida	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	37	Dokumen	61,320,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Brida	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	37 Dokumen	61,320,000	
1.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Brida	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	30,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Brida	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	30,000,000	

							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Brida	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Paket	287,750,000	Tambaahan Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Brida	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	287,750,000	Tambaahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Brida	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	684,808,875	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Brida	Jumlah Pelaporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	684,808,875	
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Brida	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	58,915,728	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Brida	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	58,915,728	

1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Brida	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	625,893,147	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Brida	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	625,893,147	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Brida	Jumlah Barang Milik Daerah	243	Unit	135,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Brida	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	243 Unit	320,000,000	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	250,000,000	Tambaahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Brida	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31	Unit	65,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Brida	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	-65,000,000	Pengurangan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD

1.7.2	Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Brida	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	212	Unit	70,000,000	Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Brida	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	212 Unit	70,000,000	
2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Kabupaten Kutai Kartanegara	**1.** Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan **2.** Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Sosial dan Kependudukan **3.** Persentase penelitian dan pengembangan yang	100	Persen	Rp 1,490,000,000.00	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Kab. Kukar	**1.** Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan **2.** Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Sosial dan Kependudukan **3.** Persentase penelitian dan pengembangan yang	100 Persen	Rp 7,155,000,000.00	

			termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan **4.** Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Inovasi						termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan **4.** Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Inovasi			
2.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegar a	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pengkajian	1	Dok	125,000,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	8 Dokumen	1,050,000,000	

			Peraturan									
							Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 laporan	150,000,000	Tambaahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD
2.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	1	Lap	125,000,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Kab. Kukar	Jumlah Laporan pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan refprmasi birokrasi	1 laporan	250,000,000	

							Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 laporan	150,000,000	Tambaahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD
							Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	1 laporan	150,000,000	Tambaahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD
							Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	2 Dokumen	100,000,000	Tambaahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD

							Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan		Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	200,000,000	Tambaahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD
							Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 laporan	50,000,000	Tambaahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD
2.2	penelitian dan pengembangan daerah bidang Sosial Dan Kependudukan	Kabupaten Kutai Kartanegar a	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Sosial Dan Kependudukan	5	Dok	1,115,000,000	penelitian dan pengembangan daerah bidang Sosial Dan Kependudukan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Sosial Dan Kependudukan	7 Dokumen	1,475,000,000	
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-	1 Dokumen	150,000,000	Tambaahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD

									Aspek Sosial			
							Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	750,000,000	Tambaahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD
2.2.1	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Kutai Kartanegar a	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1	Dok	115,000,000	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kabupat en Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	75,000,000	
2.2.2	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kabupaten Kutai Kartanegar a	Jumlah dokumen hasil penelitian tentang pengembangan partisipasi masyarakat	4	Dok	1,000,000,000	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kabupat en Kutai Kartane gara	Jumlah dokumen hasil penelitian tentang pengembangan partisipasi masyarakat	4 Dokumen	500,000,000	
2.3	penelitian dan pengembangan daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kabupaten Kutai Kartanegar a	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1	Dok	125,000,000	penelitian dan pengembangan daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kabup aten Kutai Kartan egara	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	6 Dokumen	1,025,000,000	

							Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 Dokumen	300,000,000	Tambaahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD
2.3.1	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1	Dok	125,000,000	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	3 Dokumen	625,000,000	
							Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	100,000,000	Tambaahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD
2.4	penelitian dan pengembangan daerah bidang Inovasi dan Teknologi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Inovasi dan Teknologi	1	Dok	125,000,000	penelitian dan pengembangan daerah bidang Inovasi dan Teknologi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Inovasi dan Teknologi	13 Dokumen	3,605,000,000	

							Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	400,000,000	Tambaahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD
							Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 Laporan	1,800,000,000	Tambaahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD
2.4.1	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	Lap	125,000,000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	4 Laporan	875,000,000	

							Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	230,000,000	Tambaahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD
							Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	2 Laporan	300,000,000	Tambaahan Sub Kegiatan Hasil Pembahasan Desk RKPD
					Total	13,414,800,317				Total	21,012,717,695	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan sistem kepemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja.

Beberapa stakeholder yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun PD di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi serta isu-isu aktual dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi pada Perda No 1 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019. Rencana Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah didiskusikan dalam pembahasan Forum PD tingkat Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten. Dari hasil Musrenbang tersebut belum ada usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. (Tabel terlampir pada Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah).

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Sub Kegiatan	Lokasi	ndikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1							Belum ada usulan untuk kegiatan dari hasil Musrenbang yang dilaksankan.
2							

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Agar tercapainya sinergitas kegiatan Kelitbangan serta *outcome* yang luas, maka penyusunan rencana strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Kutai Kartanegara tetap memperhatikan rencana strategis Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai ujung tombak pengembangan dunia Kelitbangan di tanah air serta tetap memperhatikan rencana strategis Provinsi Kalimantan Timur maupun rencana strategis Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam upaya peningkatan pembangunan iptek nasional dan perubahan lingkungan strategis menjadi sangat penting karena akan menentukan pilihan strategi dan upaya-upaya dalam menentukan Kebijakan yang akan diambil Pemerintah Daerah.

Berdasarkan rencana strategis Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2020-2024, maka pembangunan iptek ke depan harus diarahkan kepada Meningkatnya Produktivitas Invensi dan Inovasi untuk memperkuat Transformasi Ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan serta meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik dalam rangka Reformasi Birokrasi sesuai Sasaran Strategis. Kemampuan Iptek dan Inovasi dimaknai oleh Keahlian Sumber Daya Manusia dan Lembaga Litbang serta perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Iptek yang ditunjang oleh pembangunan faktor input (Kelembagaan, sumber daya dan jaringan). Adapun untuk memaknai daya saing bangsa adalah kontribusi Iptek dan Pendidikan tinggi dalam perekonomian yang ditunjukan oleh keunggulan produk Teknologi hasil litbang yang dihasilkan oleh industri/perusahaan yang didukung oleh lembaga litbang (LPNK, LPK, Badan Usaha, Perguruan Tinggi) dan SDM yang berkarakter unggul dan berwawasan kebangsaan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi, misi Presiden dan Wakil Presiden, ditetapkanlah misi Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk menjawab permasalahan pembangunan iptek dengan uraian sebagai berikut :

a. Peningkatan Kapabilitas IPTEK, Budaya Riset, dan Penciptaan Inovasi melalui peningkatan Kualitas SDM IPTEK, Penguatan Transformasi Ekonomi, dan Pembangunan berkelanjutan berlandaskan budaya iptek untuk peningkatan daya saing.
b. Peningkatan Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

Selain mendasarkan pada rencana strategis pada Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional, Rencana strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Kutai Kartanegara juga tetap memperhatikan rencana strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini penting sebab spektrum kelitbangan di wilayah Kalimantan Timur didorong untuk saling men-*support* dalam mencapai tujuan besar pengembangan daerah di wilayah Kalimantan Timur yaitu sebagai pusat agroindustri dan energi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. VISI MISI

Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara konseptual Visi dan Misi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah menjalankan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka menunjang Pemerintahan Daerah di bidang Riset dan Inovasi yang mana Visi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara "*Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia*".

Dengan mengemban Visi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagai pendukung dalam pelaksanaannya yang mana berkomitmen serta merumuskan hasil akhir Penelitian dan Pengembangan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk menggambarkan lebih jelas dan mewujudkan Visi yang

ingin dicapai serta menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah maka peran Badan Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan serta mendukung Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebagai berikut :

1) memanfaatkan birokrasi yang bersih, efektif, efesien dan melayani.
2) meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berahlak mulia,unggul dan berbudaya.
3) memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian,parawisata dan ekonomi kreatif.
4) meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah.
5) meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan 5 (Lima) Misi tersebut di atas, Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) yang merupakan Pelaksana Utama dan Pendukung dalam pencapaian keseluruhan misi tersebut dengan memfokuskan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pada upaya pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) dengan seluruh sumber daya organisasi yang tersedia, dituntut untuk mampu menjalankan fungsinya secara optimal guna mengemban tugas organisasi yang telah diamanatkan tersebut. Capaian Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) dalam pelaksanaan program-program pembangunan tersebut merupakan kontribusi Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) dalam melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni "*Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia*". Dalam upaya mencapai Visi tersebut maka Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Misi Pemerintah Daerah selama kurun waktu Tahun 2021 – 2026 dengan berbagai kegiatan sebagai berikut :

1) melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di Bidang Pemerintahan Daerah;
2) melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan;
3) melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah;
4) melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di Bidang Inovasi Daerah;
5) melaksanakan peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan;
6) melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya keuangan perangkat daerah;dan
7) melaksanakan peningkatan pelayanan administrasi aparatur Umum.

b. Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa penetapan Tujuan dan Sasaran. Penetapan tujuan dan sasaran tersebut didasarkan pada Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan yang diharapkan dapat mengetahui kelebihan / kekuatan yang dimiliki untuk melaksanakan aktivitas dan tidak melakukan suatu kegiatan yang mempunyai kekurangan / kelemahan.

Hal ini dimaksudkan agar Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) mampu mencapai tujuan dan sasarannya, sehingga tidak ada satu sasaran pun atau aktivitas yang tertunda atau tidak tercapai. Perumusan tujuan yang ditetapkan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) diupayakan untuk mengikuti kriteria keberhasilan perumusan yaitu :

1) Aksestabilitas, yang berarti tujuan dapat diterima oleh berbagai pihak dalam lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida);
2) Fleksibilitas, yakni mudah untuk disesuaikan dengan perubahan yang begitu cepat;

3) Dapat diukur, yaitu berarti tujuan dapat dinyatakan secara nyata dan jelas;
4) Motivator, sebagai pendorong bagi kinerja yang terpenuhi yang berarti tujuan cukup jelas namun masih dalam batasan untuk dapat dicapai;
5) Kesesuaian dengan rumusan Visi dan Misi Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida);
6) Mudah dipaham.

Berdasarkan kriteria diatas, ditetapkan tujuan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

"Meningkatnya Kinerja Penelitian dan Pengembangan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah"

c. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Kutai Kartanegara adalah "*Meningkatnya Kinerja Kelitbangan dalam Penguatan Inovasi Daerah"* dengan strategi dan arah kebijakan yang di lakukan sebagai berikut :

Strategi :

1) Melaksanakan Kajian dan Penelitian yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan daerah;dan
2) Optimalisasi Kinerja Kelitbangan dalam penguatan Inovasi Daerah.

Arah Kebijakan:

1) Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
2) Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
3) Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
4) Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi;
5) Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah;
6) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah; dan

7) Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) merupakan bagian konsep berkesinambungan (integral), tak terpisahkan dari suatu proses perencanaan strategi. Sasaran fokusnya pada *action*, yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur serta dapat diwujudkan dengan gambaran sebagai berikut :

VISI (RPJMD)	:	"Mewujud kan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"		
MISI (RPJMD)*	:	1)Memanfaatkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efesien Dan Melayani		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kinerja Penelitian dan Pengembangan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		Meningkatnya Kinerja Kelitbangan dalam Penguatan Inovasi Daerah	Melaksanakan Kajian dan Penelitian yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan daerah	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
			Optimalisasi Kinerja Kelitbangan dalam penguatan Inovasi Daerah	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
				Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
				Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi
				Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
				Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah
				Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan akan berpedoman pada kaidah –kaidah yang sudah ada yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Provinsi, Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara yaitu Program Kegiatan Pembangunan melalui Kutai Kartanegara Inovatif, Daya Saing, dan Mandiri (IDAMAN), RPJMD, RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam menyusun program dan kegiatan Brida Tahun 2025 tetap memperhatikan upaya – upaya Meningkatnya kinerja Kelitbangan dalam penguatan inovasi daerah dengan Indikator Indeks Inovasi Daerah Serta Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Brida.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2025 dengan pagu indikatif sebesar Rp21.012.717.695,- adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 8 (Delapan) kegiatan dengan Pagu indikatif sebesar Rp13.857.717.695,-.

a. Perencanaan Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Pagu dana indikatif sebesar Rp750.000.000,-

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.Pagu dana indikatif sebesar Rp10.978.510.858,-

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Pagu dana indikatif sebesar Rp105.000.000,-

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Pagu dana indikatif sebesar Rp155.000.000,-

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah.Pagu dana indikatif sebesar Rp576.647.962,-

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pagu dana indikatif sebesar Rp287.750.000,-

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pagu dana indikatif sebesar Rp684.808.875,-

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pagu dana indikatif sebesar Rp320.000.000,-

2) Program Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari 4 (Empat) Kegiatan dengan Pagu indikatif sebesar Rp7.155.000.000,-.

a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.Pagu dana indikatif sebesar Rp1.050.000.000,-

b. Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan. Pagu dana indikatif sebesar Rp1.475.000.000,-

c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Pagu dana indikatif sebesar Rp1.025.000.000,-

d. Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi. Pagu dana indikatif sebesar Rp3.605.000.000,-

Tabel TC. 33

Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

OPD : Riset dan Inovasi Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	get Capaian Kinerja		uhan Dana/Pagu Indikatif	umber Dana		get Capaian Kinerja		uhan Dana/ Pagu Indikatif
5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	Brida	93 NILAI		13,857,717,695	APBD		95 NILAI		11,884,800,317
5	05	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Brida	7	Dokumen	750,000,000	APBD		7	Dokumen	270,000,000
					PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Brida	1	Dokumen	50,000,000	APBD		1	Dokumen	-

					PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Brida	1	Dokumen	50,000,000	APBD		1	Dokumen	-
5	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Brida	3	Dokumen	450,000,000	APBD		3	Dokumen	100,000,000
5	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Brida	1	Laporan	50,000,000	APBD		1	Laporan	100,000,000
5	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Brida	1	Laporan	150,000,000	APBD		1	Laporan	70,000,000
5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang	Brida	7	Laporan	10,978,510,858	APBD		7	Laporan	10,013,343,480

						akuntabel										
5	05	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Brida	76	Orang / Bulan	10,781,720,858	APBD		76	Orang / Bulan	9,866,553,480
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Brida	1	Laporan	25,000,000	APBD		0	Dokumen	-
5	05	01	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Brida	6	Laporan	146,790,000	APBD		6	Laporan	146,790,000
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Brida	0	Dokumen	25,000,000	APBD		0	Laporan	-
5	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Brida	4	Dokumen	105,000,000	APBD		7	Dokumen	50,000,000

					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Brida	1	Dokumen	25,000,000	APBD		0	Dokumen	-
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Brida	1	Laporan	50,000,000	APBD		0	Laporan	-
5	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Brida	2	Laporan	30,000,000	APBD		6	Laporan	50,000,000
5	05	01	2.03	06	Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Brida	0	Laporan	-	APBD		1	Laporan	-
5	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Brida	6	Dokumen	155,000,000	APBD		6	Dokumen	155,000,000
2	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Brida	10	Orang	95,000,000	APBD		10	Orang	95,000,000
2	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Brida	5	Orang	60,000,000	APBD		5	Orang	60,000,000

					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Brida	1	Unit	287,750,000	APBD					287,750,000
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Brida	1	Peket	287,750,000						287,750,000
5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan administrasi umum	Brida	7	Pelayanan	576,647,962	APBD		7	Pelayana n		576,647,962
5	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Brida	3	Paket	135,000,000	APBD		3	Paket		135,000,000
5	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Brida	2	Paket	124,450,000	APBD		2	Paket		124,450,000
5	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Brida	2	Paket	30,002,325	APBD		2	Paket		30,002,325
5	05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Brida	2	Paket	45,883,637	APBD		2	Paket		45,883,637
5	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Brida	88	Laporan	149,992,000	APBD		88	Laporan		149,992,000

5	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Brida	37	Dokumen	61,320,000	APBD		37	Dokumen	61,320,000
5	05	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Brida	1	Dokumen	30,000,000	APBD		1	Dokumen	30,000,000
5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Brida	12	Bulan	684,808,875	APBD		12	Bulan	684,808,875
5	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Brida	12	Laporan	58,915,728	APBD		12	Laporan	58,915,728
5	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Brida	12	Laporan	625,893,147	APBD		12	Laporan	625,893,147
5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Brida	242	Unit	320,000,000	APBD		242	Unit	135,000,000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Brida	30	Unit	250,000,000	APBD		30	Unit	-

					Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya									
5	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Brida	0	Unit	-	APBD		31	Unit	65,000,000
5	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Brida	212	Unit	70,000,000	APBD		212	Unit	70,000,000

5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	**1.** Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan **2.** Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Sosial Dan Kependudukan **3.** Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan **4.** Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	100	Persen	Rp 7,155,000,000.00	APBD		100	Persen	Rp 1,490,000,000.00
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara	8	Laporan	1,050,000,000	APBD		1	Dokumen	125,000,000

5	05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Laporan	150,000,000	APBD		-	-		-
5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang aparatur dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Laporan	250,000,000	APBD		-	-		-
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Laporan	150,000,000	APBD		-	-		-
5	05	02	2.01	10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang keuangan dan aset desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang keuangan dan aset desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Laporan	150,000,000	APBD		-	-		-

5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Kabupaten Kutai Kartanegara	2	Dokumen	100,000,000	APBD		-	-		-
					Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Rekomendasi	200,000,000	APBD		-	-		-
5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Laporan	50,000,000	APBD		-	-		-
5	05	02	2.02		Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Sosial Dan Kependudukan	Kabupaten Kutai Kartanegara	7	Dokumen	1,475,000,000	APBD		2	Dokumen	1,115,000,000	
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Dokumen	150,000,000	APBD		-	-		-

5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Dokumen	750,000,000	APBD		-	-		-
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Dokumen	75,000,000	APBD		-	-		-
5	05	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kabupaten Kutai Kartanegara	4	Dokumen	500,000,000	APBD		1	Dokumen	1,000,000,000	
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kabupaten Kutai Kartanegara	6	Dokumen	1,025,000,000	APBD		1	Dokumen	125,000,000	
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	2	Dokumen	300,000,000	APBD		-	-		-
5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Kutai Kartanegara	3	Dokumen	625,000,000	APBD		-	-		-

	05	02	2.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan sumber daya mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan sumber daya mineral	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Dokumen	100,000,000	APBD		-	-	-
5	05	02	2.04		Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Inovasi dan Teknologi	Kabupaten Kutai Kartanegara	13	Dokumen	3,605,000,000	APBD		1	Laporan	125,000,000
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	2	Dokumen	400,000,000	APBD		-	-	-
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kabupaten Kutai Kartanegara	2	Laporan	1,800,000,000	APBD		-	-	-
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kabupaten Kutai Kartanegara	4	Laporan	875,000,000	APBD		-	-	-

5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	3	Laporan	230,000,000	APBD		-	-	-
5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kabupaten Kutai Kartanegara	2	Laporan	300,000,000	APBD		1	Laporan	125,000,000
Total Pagu										Rp 21,012,717,695	APBD				Rp 13,374,800,317

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Rumusan Program dan Kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2025 masih menggunakan formulasi awal namun ada penambahan berdasarkan analisis kebutuhan yang masih sesuai dengan Renstra tahun 2021 – 2026. Sehingga terdapat perubahan pada hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan Brida Tahun 2025.

d. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Sebagai mana Format Tabel Berikut :

No	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Sakip Perangkat Daerah	93 Nilai	13,857,717,695
1.1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	750,000,000
1.1.1	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Brida	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50,000,000
1.1.2	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Brida	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	50,000,000
1.1.3	Penyusunan Dokumen	Brida	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	3 Dokumen	450,000,000

	Perencanaan Perangkat Daerah		Daerah		
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Brida	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50,000,000
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	150,000,000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Brida	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	7 Dokumen	10,978,510,858
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Brida	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang / Bulan	10,781,720,858
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Brida	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25,000,000
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Brida	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	146,790,000
1.2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Brida	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25,000,000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	5 Dokumen	105,000,000
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Brida	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25,000,000
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Brida	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50,000,000
1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Brida	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	2 Laporan	30,000,000

	Barang Milik Daerah pada SKPD		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
1.3.3	Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	Brida	Jumlah Laporan Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	155,000,000
1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Brida	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	95,000,000
1.4.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Brida	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	60,000,000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Brida	Jumlah Pelayanan administrasi umum	7 Pelayanan	576,647,962
1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Brida	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	135,000,000
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Brida	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	124,450,000
1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Brida	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	30,002,325
1.5.4	Penyediaan Bahan/Material	Brida	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	45,883,637
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Brida	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88 Laporan	149,992,000
1.5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Brida	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	37 Dokumen	61,320,000
1.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Brida	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	30,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Brida	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Paket	287,750,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Brida	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	287,750,000

1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Brida	Jumlah Pelaporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	684,808,875
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Brida	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	58,915,728
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Brida	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	625,893,147
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Brida	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	243 Unit	320,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Brida	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	250,000,000
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Brida	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	-
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Brida	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	212 Unit	70,000,000
2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Kabupaten Kutai Kartanegara	**1.** Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan **2.** Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Sosial dan Kependudukan **3.** Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan	100 Persen	Rp 7,155,000,000.00

			4. Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Inovasi		
2.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	8 Dokumen	1,050,000,000
2.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	150,000,000
2.1.2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan refprmasi birokrasi	1 Laporan	250,000,000
2.1.3	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	150,000,000
2.1.4	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	1 Laporan	150,000,000
2.1.5	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	2 Dokumen	100,000,000
2.1.6	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap	1 Laporan	200,000,000

	dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan		Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan		
2.1.7	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	50,000,000
2.2	penelitian dan pengembangan daerah bidang Sosial Dan Kependudukan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Sosial Dan Kependudukan	7 Dokumen	1,475,000,000
2.2.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	1 Dokumen	150,000,000
2.2.2	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	750,000,000
2.2.3	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	75,000,000
2.2.4	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil penelitian tentang pengembangan partisipasi masyarakat	4 Dokumen	500,000,000
2.3	penelitian dan pengembangan daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	6 Dokumen	1,025,000,000
2.3.1	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 Dokumen	300,000,000
2.3.2	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	3 Dokumen	625,000,000
2.3.3	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	100,000,000
2.4	penelitian dan pengembangan daerah bidang	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang	13 Dokumen	3,605,000,000

	Inovasi dan Teknologi		Bidang Inovasi dan Teknologi		
2.4.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	400,000,000
2.4.2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 Laporan	1,800,000,000
2.4.3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	4 Laporan	875,000,000
2.4.4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	230,000,000
2.4.5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	2 Laporan	300,000,000
				Total	21,012,717,695

BAB V
P E N U T U P

Rencana Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Adapun proses penyusunan RKPD Tahun 2025 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja pemerintah, maka dengan beberapa catatan sebagai berikut :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Kelitbangan dibutuhkan dalam kurun waktu selama 6 bulan mulai dari penyusunan pengelola administrasi kegiatan sampai dengan laporan akhir kegiatan. Apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka kegiatan kelitbangan akan mengambil kegiatan yang sangat prioritas dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi Brida.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

   Pelaksananaan kegiatan dibutuhkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

   1. Judul kegiatan berdasarkan Indea consep paper (ICP)
   2. Dilanjutkan dengan Pembuatan Kerangka Acuan Kegiatan.
   3. Pembuatan Rencana Kerja Anggaran.
   4. Pembuatan Dokumen Perencanaan Anggaran.
   5. Pembuatan SK Pejabat Kuasa Penguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
   6. Pembuatan SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
   7. Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan.
   8. Penunjukan Tenaga Peneliti.
   9. Pengajuan Proposal.
   10. Kesepakatan Kerjasama Kegiatan.
   11. Pelaksanaan Kegiatan (Pengambilan Data, Pembuatan Draf Laporan Hasil, Laporan Hasil, Pra Seminar Dan Seminar, Laporan Akhir).
   12. Penyampaian Rekomendasi Ke Pemangku Kepentingan.

c. Rencana tindak lanjut

Adapun langkah tindak lanjut yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabuparten Kutai Kartanegara adalah sebagai Berikut :

1. Menampilkan usulan Program dan Kegiatan serta sub Kegiatan yang bersumber dari Pengampu Kepentingan;
2. Memperbaiki uraian-uraian dan tata naskah yang belum sesuai substansi Renja 2023 antara lain, memperbaiki Landasan Hukum Peraturan Perundangan yang telah tidak sesuai;
3. Membuat Surat Keputusan (SK) Kepala Brida tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025.
4. Menyesuaikan Sub Kegiatan yang tidak ada anggaran dengan cara mengosongkan Matrik Pada TC. 29, TC 30, TC 31 dan TC 33.
5. Menyesuaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Brida dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026;
6. Menyesuaikan Peraturan Bupati nomor 10 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Brida Kutai Kartanegara dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perangkat Daerah;
7. Uraian Objek Sub Kegiatan disesuaikan dengan Indikator Kenerja Utama (IKU) RPJMD diprioritaskan pada nilai atau skor Indeks yang datanya bukan bersumber dari Kementerian;
8. Mengusulkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan Indeks Inovasi Daerah (IID) masuk kedalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2021-2026 Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Melakukan Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pemangku Kinerja dalam melakukan Kajian, Penelitian, Fasility Study agar hasilnya benar-benar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan;

Rencana Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh disiplin, dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan good governance khususnya di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian penyampaian Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANHIR RENJA) tahun anggaran 2025, semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu melimpahkan Rahmat dan Berkah buat kita semua.

f.RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Ranwal PD). Dokumen tersebut merupakan dokumen rancangan awal perencanaan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disebut Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan, yaitu pemungutan PAD yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah untuk mendukung capaian visi dan misi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026. Rencana dan strategi untuk mendukung capaian visi dan misi kepala daerah tersebut disusun dalam dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencapai target kinerja utama kepala daerah, serta untuk menangani isu strategis pelayanan Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rancangan Rancana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun 2024 disusun untuk menjabarkan prioritas dan target kinerja serta menjadi pedoman pelaksanaan dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai panduan arah kebijakan pembangunan sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan;
2. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
3. Memastikan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan konsistensi program dan kegiatan sampai dengan dokumen penyusunan dokumen anggaran;
4. Memastikan konsistensi arah kebijakan perangkat daerah dengan rumusan pelaksanaannya melalui program/kegiatan;

5. Mendukung prioritas Bupati Kutai Kartanegara pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun sesuai dengan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD 2025.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai:
  - a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
  - b. Uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan.
  - c. Penjelasan.
  - d. Tabel rencana Program dan Kegiatan.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa ;

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya. ketersediaan Anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD.

Tahun 2025 merupakan perencanaan tahun ke-lima Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, dimana proses penyusunan Renstra 2021 - 2026 dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025, sehingga penetapan target kinerjanya berpedoman pada RPJMN 2024 – 2024, RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 – 2025, RPJMD Teknokratik 2021 dan Rancangan Awal RKPD 2024. Dokumen tersebut yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Untuk dapat menetapkan target kinerja indikator program, kegiatan dan pagu indikatif Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, maka dilakukan evaluasi hasil Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dengan menilai capaian realisasi indikator program dan kegiatan, serta memperkirakan capaian realisasi kinerja indikator program dan kegiatan tahun 2024. Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.

Secara umum rata-rata capaian fisik realisasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 mencapai 95% dengan predikat kinerja sangat tingi dan realisasi keuangan sebesar Rp58.656.497.368,- atau 92,53% dari Pagu Bapenda sebesar Rp63.389.143.244,-

Dengan rincian capaian kinerja masing-masing program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator Nilai Sakip Perangkat Daerah telah memenuhi target kinerja dengan capaian realisasi kinerjanya sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp50.324.659.925,- atau 92,3% dari pagu sebesar Rp54,528.143.244,- Tercapainya target kinerja program disebabkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan output yang ditargetkan dapat tercapai semua.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

   Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator kinerja Ketepatan Penetapan Dana Bagi Hasil Pusat telah memenuhi target dengan capaian target untuk 2023 dari target 95,78% serta realisasi keuangan sebesar 94,4% atau Rp670.861.651,- dari pagu sebesar Rp711.000.000,-

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

   Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja Presentasi Kepatuhan Wajib Pajak Daerah tidak memenuhi target kinerja dengan rata-rata capaian realisasi kinerjanya sebesar dan realisasi keuangan sebesar Rp7.620.846.251,- atau 93,5% dari pagu Rp8.150.000.000,- Tercapainya target kinerja program Program Pengelolaan Pendapatan Daerah disebabkan output yang ditargetkan dapat tercapai semua.

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Review hasil pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daeah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023, dan pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026 terlampir dalam format tabel berikut (Tabel T-C.29)

Tabel T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024(TAHUN BERJALAN)

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA-PD) TAHUN 2021 - 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (2023)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA-PD TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA-PD S/D TAHUN BERJALAN (2024)	
					TARGET RENJA-PD TAHUN (2024)	REALISASI RENJA-PD TAHUN (2024)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0 Persen	0	100	200 Persen	2,00
		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Perangkat Daerah	9 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	0 Persen	0	8	16 Persen	1,78
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	0 Dokumen	0	6	4 Dokumen	2,00

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0	1	1 Dokumen	2,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0	1	1 Dokumen	2,00
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0 Persen	100	100	200 Persen	2,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	283 Orang	14 Bulan	283 Orang	283 Orang	2	280	577 Orang	2,04

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2	2	2 Dokumen	5,00

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestera n SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1	12	36 Laporan	3,00
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	Persen	0 Persen			100 Persen	1,00
			Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1	4	12 Laporan	3,00
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-Rata Nilai Kinerja ASN	80 Persen	80 Persen	80 Persen	0 Persen	0	80	240 Persen	3,00

			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	1	11	33 Dokumen	0,14
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	1	30	90 Orang	3,00
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 Persen	80 Persen	80 Persen	0 Persen	0	80	240 Persen	3,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	30 Paket	1 Paket	1	30	90 Paket	3,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (makan/minum)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	4.054 Paket	4.054 Paket	4.000 Paket	1 Paket	1	4.000	12.054 Paket	2,97

				Disediakan								
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	40 Paket	1 Paket	1	40	120 Paket	3,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000 Laporan	1.000 Laporan	1.000 Laporan	1 Laporan	1	1.000	3.000 Laporan	3,00
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.000 Dokumen	1.000 Dokumen	1.000 Laporan	1 Dokumen	1	1.000	3.000 Dokumen	3,00
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketersediaan Barang Milik Daerah	100 persen	100 persen	100 Persen	1 persen	0	100	300 persen	3,00
			Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15 unit	30 unit	20 unit	1 unit	0	20	70 unit	4,67

			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	unit	3	unit	3	unit	1	unit	1	1	3	unit	3,00
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah	80	Persen	80	Persen	80	Persen	0	Persen	0		160	Persen	2,00
			Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25	Laporan	25	Laporan	25	Laporan	1	Laporan	1	25	75	Laporan	3,00
			Penyediaan Jasa sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	1	Laporan	1	12	36	Laporan	3,00
			Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	2	Laporan	2	Laporan	4	Laporan	0	Laporan	0	4	10	Laporan	5,00

				Kantor yang Disediakan													
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	58	Laporan	58	Laporan	12	Laporan	0	Laporan	0	12	82	Laporan	1,41
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	1	Bulan	12	12	12	Bulan	3,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	unit	6	unit	6	unit	6	unit	1	6	18	unit	3,00
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	50	unit	50	unit	50	unit	50	unit	1	50	150	unit	3,00
			Pemeliharaan mesin	Jumlah Peralatan dan	100	unit	100	unit	50	unit	50	unit	1	50	200	unit	2,00

			lainnya	Mesin Lainnya yang Dipelihara									
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	1	5	15 unit	3,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentasi Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	29 persen	27.65 persen	50 persen	0 persen	0	50	50 persen	1,70
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah WP yang Lapor	52.812 WP	60.451 WP	68.750 WP	0 WP	0	68.750	197.951 WP	3,75
				Jumlah WP	180.000 WP	199.697 WP	137.500 WP	0 WP	0	137.500	474.697 WP	2,64
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0	2	5 Dokumen	5,00
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	0	3	7 Dokumen	7,00

			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	3 Laporan	5 Laporan	0 Laporan	0	5	13 Laporan	4,33
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3.746 Laporan	3.746 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0	2	3.750 Laporan	1,00
			Pengolahan,Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	180.000 Laporan	180.000 Laporan	3 Laporan	0 Laporan	0	3	180.006 Laporan	1,00
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBBBP2) serta Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	160.000 Objek Pajak	160.000 Objek Pajak	160.000 Objek Pajak	0 Objek Pajak	0	160.000	480.000 Objek Pajak	3,00

			Penetapan Wajib pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	11.000 Dokumen	11.000 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0	2	11.004 Dokumen	1,00
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7.491 Layanan	7.491 Layanan	7.491 Layanan	0 Layanan	0	7.491	22.473 Layanan	3,00

			Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	180.000	Dokumen	180.000	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0	2	180.004	Dokumen	1,00
			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1.000	Dokumen	1.000	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0	2	1.004	Dokumen	1,00
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	80	Dokumen	80	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0	2	84	Kasus	1,05
			Pengendalian,Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100	Dokumen	100	Dokumen	3	Dokumen	0	Dokumen	0	3	106	Wajib pajak	1,06
			Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	100	Laporan	100	Laporan	2	Laporan	0	Laporan	0	2	104	Laporan	1,04

			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana Pengelolaan pajak	1	Unit	1	Unit	1	Unit	0	Unit	0	1	3	Unit	3,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan penetapan dana bagi hasil pusat	95	Persen	96	Persen	95	Persen	0	Persen	0	95.48	96	Persen	1,00
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perhitungan penerimaan DBH Pusat	1.847	Triliun Rupiah	2.272	Triliun Rupiah	2.112	Triliun Rupiah	0	Triliun Rupiah	0	2.112	6.496	Triliun Rupiah	3,52
				Realisasi penerimaan DBH Pusat	1.937	Triliun Rupiah	2.372	Triliun Rupiah	2.212	Triliun Rupiah	0	Triliun Rupiah	0	2.212	6.796	Triliun Rupiah	3,51
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Ketepatan Perhitungan Dana Bagi Hasil	1	dokumen	1	dokumen	1	Laporan	0	Laporan	0	1	3	Laporan	3,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah perlu didukung oleh pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan maupun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dalam pengelolaannya dan merupakan kemampuan keuangan daerah sendiri dimana setiap daerah diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam regulasi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Pendapatan Asli Daerah merupakan alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya untuk keperluan rutin.

Untuk itu Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara harus melakukan upaya peningkatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.

Dan dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Badan Pendapatan Daerah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta sub kegiatan selama tahun 2024.

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah pada Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan memperhatikan perkiraan pertumbuhan rasio pendapatan pada tahun yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Target dan Realisasi capaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan indikator Pertumbuhan Pajak Daerah sesuai dengan Target Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2025 sesuai dengan Tabel terlampir (Tabel T-C.30)

Tabel T-C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA-PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pertumbuhan Pajak Daerah			7,52%	8,43%	9,66%	11,33%	7,52%	24,13%	24,13%	24,13%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Badan Pendapatan Daerah menemukan kendala dan hambatan- hambatan untuk melaksanakan program dan kegiatannya. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah:

a. Banyaknya potensi pajak daerah yang belum tergali
b. Kurangnya koordinasi Pemungutan Pajak
c. Kondisi Geografis yang luas
d. Hilangnya potensi Pajak Daerah
e. Kunjungan wisata ke Kutai Kartanegara tinggi tetapi tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajaran apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Dengan melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dapat diuraikan pada tabel terlampir (tabel T-C.31)

TABEL T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA PD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAPENDA	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	44.472.297.941	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	53.396.069.678	
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	BAPENDA	Ketersediaan Dokumen Perangkat Daerah	100 Persen	500.000.000	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera	9 Dokumen	500.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	BAPENDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	3 Dokumen	450.000.000	Pergeseran pagu sub.keg Koordinasi Penyusunan RKAP dan Sub.Keg.Koordinasi Penyusunan DPPA untuk efesiensi Pelaksanaan

			Daerah			Daerah		Daerah			Kegiatan

	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	BAPENDA	-	-	0	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	BAPENDA	-	-	0	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	BAPENDA	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	50.000.000	
	Pelaksanaan Forum Peramgkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA	-	-	0	Pelaksanaan Forum Peramgkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan	BAPENDA	Jumlah Hasil Berita Acara Forum Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000	

						Perangkat Daerah					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	BAPENDA	-	-	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	BAPENDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	2 Dokumen	150.000.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	50.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabe	5 Laporan	31.350.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabe	5 Laporan	37.438.771.737	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 Orang	31.340.331.853		BAPENDA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 orang	37.118.771.737	Pagu sesuai catatan dari tim Anggaran BPKAD

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	40.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	25.000.000	Pergeseran pagu dari sub.keg.Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran,untuk efesiensi pelaksanaan kegiatan

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	250.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	270.000.000	Penambahan pagu disesuaikan dengan kebutuhan pagu yang selalu kurang di akhir tahun
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BAPENDA	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	40.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BAPENDA	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	25.000.000	Pagu dana digeser ke sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD untuk efesiensi pelaksanaan kegiatan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	4 Laporan	200.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	4 Laporan	115.000.000	

	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BAPENDA	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BAPENDA	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	0	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000	

	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	BAPENDA	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	BAPENDA	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	100.000.000,00	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	400.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	400.000.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BAPENDA	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	100.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BAPENDA	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	150.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan	BAPENDA	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	30 Orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan	BAPENDA	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	40 Orang	250.000.000	

	Fungsi		Pelatihan			tugas dan Fungsi		Pendidikan dan Pelatihan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BAPENDA	Persentase Administrasi umum Perangkat	80 Persen	2.700.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BAPEN D A	Persentase Administrasi umum Perangkat	80 Persen	1.900.000.000	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	BAPENDA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	300.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	BAPENDA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	300.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (makan/minum)	BAPENDA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.054 Paket	300.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (makan/minum)	BAPENDA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.054 Paket	300.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BAPENDA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	45 Paket	200.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BAPENDA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	45 Paket	200.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000 Paket	1.800.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000 Paket	1.000.000.000	

	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BAPENDA	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.000 Dokumen	100.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BAPENDA	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.000 Dokumen	100.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BAPENDA	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	80 Persen	4.300.086.797	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BAPENDA	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	80 Persen	5.800.086.797	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPENDA	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Unit	1.000.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPENDA	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Unit	2.500.000.000	
	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BAPENDA	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	3.300.086.797	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BAPENDA	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.300.086.797	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.172.211.144	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.372.211.144	
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25 Laporan	10.000.000	Penyediaan jasa Surat Menyurat	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25 Laporan	0	
	Penyediaan Jasa sumber Daya Air	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 Laporan	1.000.000.000	Penyediaan Jasa sumber Daya Air dan	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 laporan	1.500.000.000	

	dan Listrik		dan Listrik yang Disediakan			Listrik		dan Listrik yang Disediakan			
	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	100.000.000	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	100.000.000	Penambahan volume target,ada tiga gedung UPT yang di sewa

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	58 Laporan	1.772.211.144	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPENDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	58 Laporan	1.772.211.144	
	Pemelharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	80 Persen	1.850.000.000,	Pemelharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	80 Persen	3.450.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	BAPENDA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	650.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	BAPENDA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit	650.000.000	

	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	BAPENDA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	500.000.000	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	BAPENDA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	500.000.000	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BAPENDA	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan yang dipelihara/ direhabilitasi	5 Unit	700.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BAPENDA	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan yang dipelihara/direhabilit asi	9 Unit	2.300.000.000	

	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Presentasi Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	50 Persen	5.150.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Presentasi Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	50 Persen	7.900.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah WP yang Lapor	68.750 WP	5.150.000.000	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah WP yang Lapor	68.750 WP	7.900.000.000	
			Jumlah WP	137.500 WP				Jumlah WP	137.500 WP		
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	200.000.000	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	500.000.000	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan pajak Daerah	BAPENDA	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	250.000.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan pajak Daerah	BAPENDA	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	250.000.000	

	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	675.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	750.000.000	

	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3.746 Laporan	500.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3.746 Laporan	1.650.000.000	
	Pengolahan,Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	180.000 Laporan	400.000.000	Pengolahan,Pem e liharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	180.000 Laporan	400.000.000	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBBBP2) serta Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BAPENDA	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	160.000 Objek pajak	500.000.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBBBP2) serta Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BAPENDA	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	160.000 Objek Pajak	500.000.000	

	Penetapan Wajib pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	11.000 Dokumen	250.000.000	Penetapan Wajib pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	11.000 Dokumen	500.000.000	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	BAPENDA	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7.491 Layanan	200.000.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	BAPENDA	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7.491 Layanan	200.000.000	

	Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	180.000 Dokumen	250.000.000	Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	180.000 Dokumen	500.000.000	
	Penagihan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1.000 Dokumen	500.000.000	Penagihan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1.000 Dokumen	600.000.000	
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	80 Dokumen	350.000.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	80 Dokumen	500.000.000	
	Pengendalian,Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100 Dokumen	200.000.000	Pengendalian,Pe meriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100 Dokumen	400.000.000	

	Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	100 Laporan	150.000.000	Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	100 Laporan	300.000.000	

	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah unit sarana dan prasarana pengelolaan pajak	1 Unit	450.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA	Jumlah unit sarana dan prasarana Pengelolaan pajak	1 Unit	450.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Ketepatan Penetapan Dana Bagi Hasil Pusat		600.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Ketepatan Penetapan Dana Bagi Hasil Pusat		650.000.000	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Perhitungan Penerimaan DBH Pusat			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Perhitungan Penerimaan DBH Pusat		611.000.000	
			Realisasi Penerimaan DBH Pusat					Realisasi Penerimaan DBH Pusat			
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BAPENDA	Ketepatan Perhitungan Dana bagi hasil	95.78 Persen	611.000.000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BAPENDA	Ketepatan Perhitungan Dana Bagi Hasil	95,78 Persen	611.000.000	
	Jumlah				50.222.297.941					61.946.069.678	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan dan sub.kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah merupakan hasil rumusan perencanaan melalui Musrenbang tingkat kabupaten.

Dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD tingkat kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kartanegara tidak memiliki kegiatan yang berhubungan langsung dengan para pemangku kepentingan, baik dari provinsi, LSM, Asosiasi maupun Perguruan tinggi.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Adapun arah kebijakan dan strategis pembangunan nasional adalah:

1. Melanjutkan kebijakan ekonomi yang berpihak pada pertumbuhan, berpihak pada pekerjaan, berpihak pada kaum miskin, dan berpihak pada lingkungan;
2. Kebijakan hilirisasi pengelolaan sumber daya alam;
3. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal untuk pengembangan industri di luar Pulau Jawa;
4. Sinergi SDM, IPTEK dengan industri;
5. Pengembangan sektor perikanan dan infrastruktur pedesaan;
6. Penguatan kelembagaan masyarakat dan UKM;
7. Penguatan ketahanan pangan dan energi;
8. Akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung sistem logistik nasional.

Arah kebijakan nasional harus memenuhi 3 (tiga) kriteria utama, yaitu:

1. Layak secara ekonomi, dengan ciri:
    a. Program-program strategis yang dikembangkan harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
    b. Mempunyai nilai tambah yang tinggi;
    c. Program harus berdampak signifikan terhadap pembangunan nasional dan wilayah;
    d. Menunjang sinergi dan optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
    e. Melanjutkan program-program strategis yang belum tercapai;
    f. Berdampak luas terhadap investasi nasional.
2. Diterima secara sosial, dengan ciri:
    a. Tidak menimbulkan masalah baru;
    b. Membuka/menyerap lapangan kerja;
    c. Mengurangi kemiskinan;
    d. Mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah;
    e. Memberikan dampak untuk kepentingan masyarakat;

f. Mendorong keharmonisan masyarakat;
g. Mendorong tingkat partisipasi masyarakat.

3. Berkelanjutan secara ekonomi, dengan ciri:
   a. Dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan masih dalam batas yang ditoleransi;
   b. Memperbaiki kualitas lingkungan;
   c. Program yang dikembangkan menghasilkan manfaat tidak hanya bagi generasi saat ini, namun juga bagi generasi mendatang

Dalam penerapan sistem penganggaran terpadu, telah dilakukan penyatuan dokumen perencanaan belanja negara sehingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran menjadi lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, duplikasi pendanaan untuk satu kegiatan yang sama dapat dihindari.

Pemanfaatan sistem penganggaran berbasis kinerja, bertujuan agar setiap biaya yang dialokasikan dalam suatu kegiatan dapat dikaitkan dengan output dan outcome yang dihasilkan, sehingga terjadi perpaduan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan. Permasalahan yang timbul dalam penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja adalah sulitnya merumuskan indikator kinerja sebagai alat pendeteksi tercapainya output dan outcome yang dikehendaki.

Selanjutnya, tantangan dalam implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah, diantaranya adalah sulitnya menentukan pengeluaran (belanja negara) dalam perspektif jangka menengah, dengan mempertimbangkan resiko dan implikasi biaya yang berpotensi terjadi pada tahun tahun berikutnya.

Bahwa dokumen Rancangan RKPD mengacu pada Rancangan RPJMD tahun 2021-2026, dimana dokumen tersebut memuat visi dan misi Pemerintah kabupaten yang wajib dipedomi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BAPENDA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai

Kartanegara tahun 2021-2026.

Ada pun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai BAPENDA Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah
2. Meningkatnya kemandirian fiskal Daerah

Sasaran :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah
2. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
3. Optimalnya penerimaan Dana Bagi Hasil

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan kegiatan

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dapat terwujud. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgenitas dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program.Program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2025 sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis guna menyesuaikan dengan kondisi kontemporer didaerah, terutama terkait dengan daya dukung pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicantumkan dalam rencana strategis. Sesuai dengan visi BAPENDA Kabupaten Kutai Kartanegara seperti yang tertuang dalam draf Renstra BAPENDA adalah :“ Menuju Kemandirian Fiskal Daerah melalui Data Tarik Investasi ”

Estimasi kebutuhan dana/anggaran dimanfaatkan untuk melaksanakan 3 (Tiga) program yang dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) kegiatan dan 48 sub kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selalu berada dalam koridor untuk mewujudkan tujuan dan arah kebijakan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sesuai dengan visi BAPENDA Kabupaten Kutai Kartanegara seperti yang tertuang, maka program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 sesuai tabel terlampir (Tabel T-C.33)

Tabel (T-C.33)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA	100%	53.396.069.678			100%	53.396.069.678
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Perangkat Daerah	BAPENDA	9 Dokumen	900.000.000			9 Dokumen	900.000.000
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daera		1 Dokumen	50.000.000			1 Dokumen	50.000.000
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		1 data	50.000.000			1 data	50.000.000

			Pelaksanaan Forum Peramgkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Hasil Berita Acara Forum Perangkat Daerah		1 Berita Acara	50.000.000			1 Berita Acara	50.000.000

			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA	6 Dokumen	450.000.000	APBD		6 Dokumen	450.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BAPENDA	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPENDA	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD		2 Dokumen	150.000.000			2 Dokumen	150.000.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	BAPENDA	5 laporan	37.438.771.737	APBD		5 laporan	34.663.842.138
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA	238 Orang	37.118.771.737	APBD		330 Orang	34.373.842.138
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BAPENDA	2 Laporan	25.000.000	APBD		1 Laporan	40.000.000

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BAPENDA	1 Laporan	270.000.000	APBD		15 Orang	250.000.000
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BAPENDA	1 Laporan	25.000.000	APBD		1 Laporan	25.000.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	BAPENDA	4 Laporan	115.000.000	APBD		Laporan	200.000.000
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	25.000.000			1 Dokumen	50.000.000
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKP		1 Laporan	50.000.000			1 Laporan	50.000.000
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	30.000.000			1 Laporan	50.000.000
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKP		1 Dokumen	10.000.000			1 Dokumen	50.000.000

			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								
			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		1 Dokumen	10.000.000			1 Dokumen	10.000.000

			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		1 Dokumen	10.000.000			1 Dokumen	10.000.000
			Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		11 Dokumen	400.000.000,00				350.000.000,00
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BAPENDA	11 Dokumen	150.000.000	APBD		11 Dokumen	100.000.000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BAPENDA	30 Orang	250.000.000	APBD		30 Orang	250.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat	BAPENDA	80 Persen	3.300.000.000	APBD		80 Persen	2.800.000.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BAPENDA	30 Paket	300.000.000	APBD		30 Paket	300.000.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (makan/minum)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BAPENDA	4.054 Paket	300.000.000	APBD		4.054 Paket	300.000.000
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	BAPENDA	45 Paket	200.000.000	APBD		45 Paket	200.000.000

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPENDA	1.000 Paket	1.000.000.000	APBD		1.000 Paket	1..000.000.000
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BAPENDA	1.000 Dokumen	100.000.000	APBD		1000 Dokumen	100.000.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	BAPENDA	80 Persen	5.800.086.797	APBD		80 Persen	4.300.086.797
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	BAPENDA	1 Unit	2.500.000.000	APBD		1 Unit	1.000.000.000
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	3.300.086.797			1 Unit	3.300.086.797
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	BAPENDA	12 Bulan	3.372.211.144	APBD		12 Bulan	3.372.211.144
			Penyediaan Jasa sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BAPENDA	12 Laporan	1.500.000.000	APBD		12 Laporan	1.000.000.000

			Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BAPENDA	3 Laporan	100.000.000	APBD		2 Laporan	100.000.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BAPENDA	58 Laporan	1.772.211.144	APBD		58 Laporan	1.772.211.144
			Pemelharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	BAPENDA	80 Persen	3.450.000.000	APBD		80 Persen	3.650.000.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BAPENDA	26 Unit	650.000.000	APBD		26 Unit	650.000.000
			Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BAPENDA	100 Unit	500.000.000	APBD		100 Unit	500.000.000
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	BAPENDA	5 unit	2.300.000.000	APBD		5 unit	2.500.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	BAPENDA	70 Persen	7.900.000.000,00	APBD		70 Persen	4.875.000.000,00
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Validitas data WP dan Penerimaan Pajak Daerah	BAPENDA	80 Persen	7.900.000.000,00	APBD		80 Persen	4.875.000.000,00

			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA	1 Dokumen	500.000.000	APBD		1 Dokumen	200.000.000
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA	1 Dokumen	250.000.000	APBD		1 Dokumen	250.000.000
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA	3 Laporan	750.000.000	APBD		3 Laporan	675.000.000
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	BAPENDA	3.746 Laporan	1.650.000.000	APBD		3.746 Laporan	500.000.000
			Pengolahan,Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA	180.000 Laporan	500.000.000	APBD		180.000 Laporan	400.000.000

			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBBP2) serta Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	BAPENDA	160.000 Objek pajak	700.000.000	APBD		160.000 Objek pajak	500.000.000

			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	BAPENDA	11.000 Dokumen	500.000.000	APBD		11.000 Dokumen	250.000.000
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BAPENDA	7.491 Layanan	200.000.000	APBD		7.491 Layanan	200.000.000
			Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	BAPENDA	180.000 Dokumen	500.000.000	APBD		180.000 Dokumen	250.000.000
			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	BAPENDA	1.000 Dokumen	600.000.000	APBD		1.000 Dokumen	500.000.000
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BAPENDA	80 Dokumen	500.000.000	APBD		80 Dokumen	350.000.000
			Pengendalian,Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA	100 Dokumen	400.000.000	APBD		100 Dokumen	200.000.000
			Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA	100 Laporan	300.000.000	APBD		100 Laporan	150.000.000

			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak	BAPENDA	1 Unit	450.000.000	APBD		1 Unit	450.000.000

			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			80 Persen	650.000.000			80 Persen	611.000.000
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perhitungan Penerimaan DBH Pusat	BAPENDA			APBD			
				Realisasi Penerimaan DBH Pusat							
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Ketepatan Perhitungan Dana bagi hasil	BAPENDA	95,78%	650..000.000	APBD		95,78%	611.000.000
			Jumlah				61.946.069.678,-				54.522.140.079,-

Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Dokumen Rencana Kerja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanagera. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pejabat eselon dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang.

Selanjutnya kami menyadari bahwa Dokumen Rencana Kerja yang disusun ini masih jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

BAB V
PENUTUP

Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Dokumen Rencana Kerja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanagera. Rancangan Awal Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pejabat eselon dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Selanjutnya kami menyadari bahwa Rancangan Renja yang disusun ini masih jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga Dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

g. RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya melalui pendekatan kinerja, pemerintah daerah fokus pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja.

Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah terkelompokkan hingga sub kegiatan akan memudahkan stakeholders untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Dalam rangka tertib perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah dimaksud, perlu disusun pedoman klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bagi pemerintah daerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dengan demikian diharapkan dapat berkontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik pemerintah daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah merupakan peraturan turunan dari Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peraturan Menteri Dalam negeri ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan diimplementasikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ tanggal 27 Januari 2020 perihal Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, seluruhOPD di pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pemetaan terhadap Program dan Kegiatan pada RPJMD yang masih berlaku dengan mempedomani Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah maka pelaksanaan pembangunan tahun Kedua RPJMD 2021-2026 yang berlandaskan pada Visi Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yakni“ :

““Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.”

Sebagai langkah upaya penyempurnaan matrik struktur program dan kegiatan melalui penetapan indikator kinerja. Hasil dari penyusunan ini akan di implementasikan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4828)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
20. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dimaksudkan untuk meletakkan landasan bagi sistem perencanaan dan penganggaran yang mampu menjamin arah pembangunan dan memiliki akuntabilitas kinerja yang terukur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan program dan kegiatan yang akan digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 ;
2. Meletakan prinsip dasar dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara secara terkoordinasi, terpadu dan tepat waktu serta sasaran yang di inginkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap rancangan Akhir RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat
Bab III Tujuan dan Sasaran
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan
Bab V Penutup
5.1. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian
5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
5.3. Rencana Tindak Lanjut
Lampiran - lampiran

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 , disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari yang direncanakan dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan, untuk menjamin setiap alokasi anggaran untuk membiayai proses pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah (RPJMD), dilaksanakan oleh OPD yang berkompeten dan bertanggungjawab dalam proses pencapaiannya

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) tahun n-2 dan Capaian Renstra Tahun 2023 :

Tabel. T-C.29.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2023

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	-																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			91,847,604,876		38,371,178,639		27,134,005,652		-				40,568,496,589				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2,250,000,000		864,526,200		450,000,000		-				864,526,200				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35	1,000,000,000	14	396,742,400	7	200,000,000			0.00 %	0.00 %	14.00	396,742,400	40.00%	39.67%	BPBD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60	500,000,000	24	184,159,300	12	100,000,000			0.00 %	0.00 %	24.00	184,159,300	40.00%	36.83%	BPBD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	25	750,000,000	5	283,624,500	2	150,000,000			0.00 %	0.00 %	5.00	283,624,500	20.00%	37.82%	BPBD	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			48,282,940,126		22,713,785,589		13,546,694,126	-	-	-	-	-	22,713,785,589	-		-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima	5,280	46,082,940,126	2470.00	21,841,109,819		13,125,745,126			0.00 %	0.00 %	2470.00	21,841,109,819	46.78%	47.40%	BPBD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		gaji dan tunjangan ASN																
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70	400,000,000	21.00	159,861,500		86,000,000			0.00 %	0.00 %	21.00	159,861,500	30.00%	39.97%	BPBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	60	1,800,000,000	32.00	712,814,270		334,949,000			0.00 %	0.00 %	32.00	712,814,270	53.33%	39.60%	BPBD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah			850,000,000		-		150,000,000	-	-	-	-	-	-	-		-	
	Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik	450	850,000,000	0.00	-		150,000,000			0.00 %	0.00 %	0.00	-	0.00 %	0.00 %	BPBD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Daerah pada SKPD																
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1,990,000,000		362,963,900		138,025,000	-	-	-	-	-	362,963,900	-		-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atributnya	450	850,000,000	550.00	192,590,900					0.00 %	0.00 %	550.00	192,590,900	122.22%	22.66%	BPBD	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	450	550,000,000	0.00	-		72,025,000			0.00 %	0.00 %	0.00	-	0.00 %	0.00 %	BPBD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300	290,000,000	250.00	170,373,000		66,000,000			0.00 %	0.00 %	250.00	170,373,000	83.33%	58.75%	BPBD	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	300,000,000	0.00	-					0.00 %	0.00 %	0.00	-	0.00 %	0.00 %	BPBD	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4,577,500,000		1,861,572,401		834,040,000	-	-	-	-	-	1,861,572,401	-	-	-	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500	52,500,000	200.00	20,977,000		10,500,000			0.00%	0.00%	200.00	20,977,000	40.00%	39.96%	BPBD	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8,500	550,000,000	5700.00	264,242,770		173,540,000			0.00%	0.00%	5700.00	264,242,770	67.06%	48.04%	BPBD	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	600	310,000,000	120.00	49,840,000		-			0.00%	0.00%	120.00	49,840,000	20.00%	16.08%	BPBD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	14,450	475,000,000	4850.00	167,091,000		100,000,000			0.00%	0.00%	4850.00	167,091,000	33.56%	35.18%	BPBD	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	37,500	425,000,000	10500.00	104,908,000		50,000,000			0.00%	0.00%	10500.00	104,908,000	28.00%	24.68%	BPBD	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,950	290,000,000	0.00	-		-			0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	BPBD	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah laporan penyelenggaraa	175	1,650,000,000	86.00	1,063,307,557		350,000,000			0.00%	0.00%	86.00	1,063,307,557	49.14%	64.44%	BPBD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	dan Konsultasi SKPD	n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jomlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500	475,000,000	225.00	115,346,074		75,000,000			0.00 %	0.00 %	225.00	115,346,074	45.00%	24.28%	BPBD	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60	350,000,000	24.00	75,860,000		75,000,000			0.00 %	0.00 %	24.00	75,860,000	40.00%	21.67%	BPBD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7,000,000,000		1,838,697,137		6,025,000,000	-	-	-	-	-	4,036,015,087	-		-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya	360	10,500,000,000	75.00	2,197,317,950		-		-	0.00 %	0.00 %	75.00	2,197,317,950	20.83%	20.93%	BPBD	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	360	600,000,000	0.00	-		-		-	0.00 %	0.00 %	0.00	-	0.00 %	0.00 %	BPBD	
	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung	7	3,500,000,000	3.00	1,385,484,007		-		-	0.00 %	0.00 %	3.00	1,385,484,007	42.86%	39.59%	BPBD	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	1,285	2,900,000,000	61.00	453,213,130		6,025,000,000			0.00 %	0.00 %	61.00	453,213,130	4.75 %	15.63%	BPBD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Lainnya yang disediakan																
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20,817,164,750		8,378,358,023		4,302,915,806	-	-	-	-	-	8,378,358,023	-		-	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	4,950	35,000,000	65.00	4,940,000		-		-	0.00 %	0.00 %	65.00	4,940,000	1.31 %	14.11%	BPBD	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	720	1,330,000,000	156.00	445,224,369		300,000,000			0.00 %	0.00 %	156.00	445,224,369	21.67%	33.48%	BPBD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13,020	19,452,164,750	2616.00	7,928,193,654		4,002,915,806			0.00%	0.00%	2616.00	7,928,193,654	20.09%	40.76%	BPBD	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6,080,000,000		2,351,275,389		1,687,330,720	-	-	-	-	-	2,351,275,389	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan	440	3,200,000,000	154.00	1,850,765,589		1,272,860,000			0.00%	0.00%	154.00	1,850,765,589	35.00%	57.84%	BPBD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Operasional atau Lapangan	pajak dan perijinannya																
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	300	440,000,000	95.00	179,400,000		75,000,000			0.00 %	0.00 %	95.00	179,400,000	31.67%	40.77%		
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	10	2,440,000,000	4.00	321,109,800		339,470,720			0.00 %	0.00 %	4.00	321,109,800	40.00%	13.16%		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			39,825,297,588		13,257,472,650		4,099,895,550		-				13,257,472,650				
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			3,255,000,000	86	595,789,761	85	1,000,000,000	65	-	76.47%	0.00%	151.00	595,789,761		18.30%	BPBD	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis	1,500	3,255,000,000	187.00	595,789,761		1,000,000,000			0.00%	0.00%	187.00	595,789,761	12.47%	18.30%	BPBD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya																
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			11,780,148,794		5,469,807,722		1,499,895,550	-	-	0.00 %	0.00 %	0.00	5,469,807,722		46.43%	BPBD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	750	2,400,000,000	150.00	223,172,000		650,000,000			0.00 %	0.00 %	150.00	223,172,000	20.00%	9.30 %	BPBD	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	220	1,987,574,397	87.00	2,247,812,397		149,999,750			0.00 %	0.00 %	87.00	2,247,812,397	39.55%	113.09%	BPBD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kabupaten/Kota																
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	850	2,255,000,000	202.00	187,500,000		149,895,800			0.00 %	0.00 %	202.00	187,500,000	23.76%	8.31 %	BPBD	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan	25	1,750,000,000	8.00	282,206,648		150,000,000			0.00 %	0.00 %	8.00	282,206,648	32.00%	16.13%	BPBD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		dan Kesiapsiagaan Bencana																
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penanganan Pasca Bencana Kab/Kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	160	400,000,000	5.00	97,404,000		150,000,000			0.00 %	0.00 %	5.00	97,404,000	3.13 %	24.35%	BPBD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi	10	2,987,574,397	87.00	2,431,712,677		250,000,000			0.00 %	0.00 %	87.00	2,431,712,677	870.00%	81.39%	BPBD	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			12,642,574,397		3,722,153,047		1,100,000,000		-	0.00 %	0.00 %	0.00	3,722,153,047		29.44%	BPBD	
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	5	250,000,000	3.00	100,000,000		100,000,000			0.00 %	0.00 %	3.00	100,000,000	60.00%	40.00%	BPBD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	160	600,000,000	1.00	148,673,020		150,000,000			0.00 %	0.00 %	1.00	148,673,020	0.63 %	24.78%	BPBD	
	Pencariaan, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	220	6,987,574,397	204.00	2,595,630,237		400,000,000			0.00 %	0.00 %	204.00	2,595,630,237	92.73%	37.15%	BPBD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	70	3,255,000,000	89.00	608,519,740		250,000,000			0.00 %	0.00 %	89.00	608,519,740	127.14%	18.69%	BPBD	
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	5	1,150,000,000	3.00	197,993,050		100,000,000			0.00 %	0.00 %	3.00	197,993,050	60.00%	17.22%	BPBD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	160	400,000,000	1.00	71,337,000		100,000,000			0.00 %	0.00 %	1.00	71,337,000	0.63 %	17.83%	BPBD	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			12,147,574,397		3,469,722,120		500,000,000		-	0.00 %	0.00 %	0.00	3,469,722,120		28.56%	BPBD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	70	2,255,000,000	5.00	140,139,400		80,000,000			0.00 %	0.00 %	5.00	140,139,400	7.14 %	6.21 %	BPBD	
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	25	2,250,000,000	6.00	273,538,000		80,000,000			0.00 %	0.00 %	6.00	273,538,000	24.00%	12.16%	BPBD	
	Kerjasama Antar Lembaga Dan kemitraan Dalam	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar	160	2,400,000,000	3.00	147,445,000		80,000,000			0.00 %	0.00 %	3.00	147,445,000	1.88 %	6.14 %	BPBD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana																
	Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	220	4,987,574,397	88.00	2,800,501,447		130,000,000			0.00 %	0.00 %	88.00	2,800,501,447	40.00%	56.15%	BPBD	
	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	70	255,000,000	5.00	108,098,273		130,000,000			0.00 %	0.00 %	5.00	108,098,273	7.14 %	42.39%	BPBD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			17,000,000,000		4,417,100,005		3,527,541,280		-				4,417,100,005				
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			9,000,000,000		2,342,362,607		1,613,336,280		-				2,342,362,607				
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran	60	3,250,000,000	14.00	813,444,440		525,000,000			0.00 %	0.00 %	14.00	813,444,440	23.33%	25.03%	BPBD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		dalam Daerah Kabupaten/Kota																
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	60	1,250,000,000	14.00	237,255,000		150,000,000			0.00 %	0.00 %	14.00	237,255,000	23.33%	18.98%	BPBD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulagan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	350	2,250,000,000	124.00	769,650,060		600,729,000			0.00 %	0.00 %	124.00	769,650,060	35.43%	34.21%	BPBD	
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki	50	1,250,000,000	10.00	223,166,216		137,607,280			0.00 %	0.00 %	10.00	223,166,216	20.00%	17.85%	BPBD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran																
	Penyelengaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, Dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulanga	35	1,000,000,000	7.00	298,846,891		200,000,000			0.00 %	0.00 %	7.00	298,846,891	20.00%	29.88%	BPBD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	n Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran																
	Investigasi Kejadian Kebakaran			250,000,000		100,000,000		-		-				100,000,000				
	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Kejadian Kebakaran yang di teliti dan diuji	5	250,000,000	2	100,000,000	-	-	-	-	0.00 %	0.00 %	2.00	100,000,000	40.00%	40.00%	BPBD	
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran			6,500,000,000		1,583,427,370		1,764,205,000	-	-				1,583,427,370				

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	35	1,500,000,000	6.00	282,787,000		200,000,000			0.00 %	0.00 %	6.00	282,787,000	17.14%	18.85%	BPBD	
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam kebakaran	Jumlah Desa/Keluraha n yang Terbentuk dan Terbina Relawan	35	1,750,000,000	4.00	277,420,000		324,205,000			0.00 %	0.00 %	4.00	277,420,000	11.43%	15.85%	BPBD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya																
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana Dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Keluraha n yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	200	3,250,000,000	25.00	1,023,220,370		1,240,000,000			0.00 %	0.00 %	25.00	1,023,220,370	12.50%	31.48%	BPBD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			1,250,000,000		391,310,028		150,000,000	-	-				391,310,028				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan	1,500	1,250,000,000	380.00	391,310,028		150,000,000			0.00 %	0.00 %	380.00	391,310,028	25.33%	31.30%	BPBD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6				7							
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis																
				148,672,902,464		56,045,751,294		34,761,442,482		-				58,243,069,244				

2.2. Analisis Kinerja pelayanan OPD

Dalam Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanggulangan Bencana terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan PerUndang- Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah merumusan dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penangganan Pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat,efektif dan efisien, serta Pengkoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana secara terarah,terpadu dan menyeluruh adalah sebagai berikut :

Tabel. T-C.30.

Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana*		*Indeks Kualitas Pelayanan Informasi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana*	*77,50*	*78*	*78,90*	*79,50*	*77,50*	*78*	*78,90*	*79,50*	*81*	
	Optimalnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	5,11%	8,11%	100%	100%	5,11%	3,00%	12,11%	15,11%	15,11%	
	Optimalnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	8,55%	10,55%	100%	100%	5,55%	10,55%	13,55%	16,55%	16,55%	
	Optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencan di daerah	-	2	2	2	-	2	2	2	2	

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD

Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan wilayah rawan akan bencana, hal ini dikarenakan topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan kemiringan landai sampai curam. kondisi ini semakin membahayakan jika praktek-praktek sistem pengelolaan sumber daya alam yang tidak seimbang, terkendali dan kurang memperhitungkan faktor lingkungan. Terkait dengan hal ini diperlukan peran yang sangat strategis dalam penanganan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara hendaknya dapat bekerja secara professional untuk keamanan masyarakat dari bencana yang akan terjadi di Kutai Kartanegara. Profesionalisme sangat dibutuhkan dalam penanganan penanggulangan bencana di daerah karena yang akan merasakan dampak dari penanganan penanggulangan bencana di daerah Kutai Kartanegara nanti adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Salah satu sumber daya yang sangat penting dalam penanganan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah partisipasi masyarakat, agar pastisipasi masyarakat dapat tercurah secara terarah, terkoordinasi dan terkonsolidasi secara efektif maka partisipasi masyarakat perlu dikelola secara tepat.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih dirasa belum memadai. Keberadaan kantor yang masih belum representatif untuk penyelenggaraan organisasi dalam rangka penanganan dan penanggulangan bencana. Kondisi ini menjadi kendala internal organisasi.

Terlepas dari kondisi sarana dan prasarana masih terdapat kelemahan dalam kapasitasnya di sumber daya aparatur terkait dengan kuantitas dan kualitas. Jumlah sumber daya aparatur yang terbatas menjadikan kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam operasional organisasi dan penganganan bencana di daerah. Selama proses penyelenggaraan organisasi masih belum tersedia sistem ketatalaksanaan yang optimal. Meskipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih berpedoman dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Terdapat pula beberapa hal terkait dengan rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara seperti intensitas bencana yang cukup tinggi yang didasari oleh kondisi topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagaimana diketahui bahwa konservasi sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup seringkali menjadi hal yang bertolak belakang. Meski memberikan keuntungan ekonomi yang besar namun ternyata eksplorasi telah mengubah derajad kualitas sumber daya alam. Dampak langsung kegiatan pertambangan diantaranya kerusakan ekologis seperti berkurangnya debit air sungai dan tanah, pencemaran air laut, dan kerusakan hutan hinggi sendimentasi tanah. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat meminimalisasi resiko bencana baik secara langsung atau tidak langsung ke masyarakat.

Berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

a. Di aspek kebijakan Penanggulangan Bencana:
    1. Belum adanya landasan hukum berkait penanggulangan bencana yang komprehensif di Kabupaten Kutai Kartanegara.
    2. Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari pendekatan responsif ke pendekatan preventif.
    3. Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan padahal hampir semua daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara rentan bencana.
    4. Penanggulangan Bencana masih bersifat sektoral dan kondisional, perlu sinkronisasi program dan kegiatan berkait pengurangan resiko bencana.
b. Dalam aspek Kelembagaan
    1. Belum lengkapnya unsur kelembagaan yaitu unsur pengarah.
    2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah relatif baru berdiri beberapa tahun, sehingga masih banyak belajar untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara ideal.

3. Belum adanya aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti : PUSDALOPS, TRC, dll
4. Fungsi Penanggulangan Bencana yang berpindah dari BPBD kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

c. Dalam aspek Ketugasan:
1. Upaya Penanggulangan Bencana masih disikapi dengan cara yang sama dengan ketugasan lain, tidak ada perkecualian.
2. Bencana yang datang tidak terduga, sehingga harus melaksanakan fungsi kesiap-siagaan dan respon time serta tanggap darurat yang mumpuni.
3. Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat responsive sehingga menimbulkan dampak yang besar.
4. Masih minimnya relawan siaga bencana.
5. Rehabilitasi dan rekonstruksi yang sekiranya akan membutuhkan biaya yang cukup besar.
6. Belum ada dukungan sumber daya yang memadai, jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana, personil.
7. Laporan Data kebencanaan yang masih belum mutakhir dan terstandar , sehingga menyulitkan proses tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir Renja

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu penyesuaian terhadap RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah dikarenakan terdapat kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan Akhir RKPD dan Pagu Anggaran OPD, perlu disesuaikan dengan kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel. T-C.31.

Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

RANCANGAN AKHIR RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				11.415.591.573	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				*11.415.591.573*
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah		8.665.591.573	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)		8.665.591.573
1	05	01	2, 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		225.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				225.000.000
1	05	01	2, 01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	100.000.000

RANCANGAN AKHIR RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif
1	05	01	2, 01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	75.000.000
1	05	01	2, 01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	50.000.000
1	05	01	2, 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.350.875.098	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.350.875.098
1	05	01	2, 02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	700 Orang/ bulan	4.130.875.098	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	700 Orang /bulan	4.130.875.098
1	05	01	2, 02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	40.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	40.000.000
1	05	01	2, 02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah laporan keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan	24 Laporan	180.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah laporan keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan	24 Laporan	180.000.000

RANCANGAN AKHIR RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif
							Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		-
1	05	01	2, 03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-
1	05	01	2, 03	04	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	6 Laporan	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	-
1	05	01	2, 03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang	Tenggarong	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	6 Laporan	-	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang	Tenggarong	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	6 Laporan	-

RANCANGAN AKHIR RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif
					Milik Daerah pada SKPD		Barang Milik Daerah pada SKPD			Milik Daerah pada SKPD		Barang Milik Daerah pada SKPD		
1	05	01	2, 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				150.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				150.000.000
1	05	01	2, 05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	100 Orang	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	100 Orang	-
1	05	01	2, 05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	10 Orang	75.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	10 Orang	75.000.000
1	05	01	2, 05	10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tenggarong	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	3 Orang	75.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tenggarong	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	3 Orang	75.000.000

RANCANGAN AKHIR RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	5 Dokumen	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	5 Dokumen	-
1	05	01	2, 05	11	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	240 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	240 Paket	-
1	05	01	2, 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				437.750.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				437.750.000
1	05	01	2, 06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong	Jumlah paket komponen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	5.250.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong	Jumlah paket komponen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	5.250.000
1	05	01	2, 06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah paket komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	55.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah paket komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	55.000.000
1	05	01	2, 06	02	Penyediaan Peraalatan Rumah Tangga	Tenggarong	Jumlah paket komponen Peralatan dan Perlengkapan	12 Paket	32.500.000	Penyediaan Peraalatan Rumah Tangga	Tenggarong	Jumlah paket komponen Peralatan dan Perlengkapan	12 Paket	32.500.000

RANCANGAN AKHIR RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif
							Kantor yang disediakan					Kantor yang disediakan		
1	05	01	2, 06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	50.000.000
1	05	01	2, 06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	42.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	42.500.000
1	05	01	2, 06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	165.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	165.000.000
1	05	01	2, 06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jomlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jomlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	50.000.000
1	05	01	2, 06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	37.500.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	37.500.000

RANCANGAN AKHIR RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif
1	05	01	2, 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.054.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.054.000.000
1	05	01	2, 07	11	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	1 Unit	500.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	1 Unit	500.000.000
1	05	01	2, 07	12	Pengadaan Mebel	Tenggarong	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	2 Unit	45.000.000	Pengadaan Mebel	Tenggarong	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	2 Unit	45.000.000
1	05	01	2, 07	13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	120 Unit	250.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	120 Unit	250.000.000
1	05	01	2, 07	14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	100 Unit	259.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	100 Unit	259.000.000
1	05	01	2, 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.077.966.475	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.077.966.475

RANCANGAN AKHIR RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif
1	05	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	50 Laporan	3.750.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	50 Laporan	3.750.000
1	05	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	129.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	129.000.000
1	05	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	1.945.216.475	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	1.945.216.475
1	05	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				370.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				370.000.000
1	05	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	66 Unit	325.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	66 Unit	325.000.000

RANCANGAN AKHIR RKPD									HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif
1	05	01	2, 09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	50 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	50 Unit	-
1	05	01	2, 09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	3 Unit	45.000.000	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	3 Unit	45.000.000
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				2.750.000.000	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				2.750.000.000
1	05	03	2, 01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				150.000.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				150.000.000
1	05	03	2, 01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk	150 Orang	150.000.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk	150 Orang	150.000.000

RANCANGAN AKHIR RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif
							yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya					yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya		
1	05	03	2, 01	03	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	-	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	-
1	05	03	2, 02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				550.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				550.000.000
1	05	03	2, 02	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di*	100 Unit	-	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di*	100 Unit	-

RANCANGAN AKHIR RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif
							kawasan tempat tinggalnya					*kawasan tempat tinggalnya*		
1	05	03	2, 02	18	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota*	500 Orang	150.000.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota*	500 Orang	150.000.000
1	05	03	2, 02	19	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam*	10 Keluarga	-	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam*	10 Keluarga	-

RANCANGAN AKHIR RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif
1	05	03	2, 02	20	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana*	4 Kawasan	200.000.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana*	4 Kawasan	200.000.000
1	05	03	2, 02	21	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan Akhir darurat bencana*	25 Orang		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan Akhir darurat bencana*	25 Orang	

RANCANGAN AKHIR RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif
1	05	03	2, 02	22	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*	1 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*	1 Dokumen	200.000.000
1	05	03	2, 02	26	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya*	2 laporan		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya*	2 laporan	
1	05	03	2, 02	28	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana*	3 Kawasan		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana*	3 Kawasan	

RANCANGAN AKHIR RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif
							Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana					*Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana*		
1	05	03	2, 03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	1.200.000.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	1.200.000.000
1	05	03	2, 03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	150.000.000	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	150.000.000
1	05	03	2, 03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	150.000.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	150.000.000

RANCANGAN AKHIR RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif
1	05	03	2, 03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	20.792 Orang	450.000.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	20.792 Orang	450.000.000
1	05	03	2, 03	07	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal*	1 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal*	1 Dokumen	-
1	05	03	2, 03	08	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis*	25 Orang	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis*	25 Orang	-
1	05	03	2, 03	09	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Kab. Kutai	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan	273 Orang	250.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Kab. Kutai	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan	273 Orang	250.000.000

RANCANGAN AKHIR RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif
					Bencana Kabupaten/Kota	Kartanegara	Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Bencana Kabupaten/Kota	Kartanegara	Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
1	05	03	2, 03	10	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	3 Laporan	100.000.000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	3 Laporan	100.000.000
1	05	03	2, 03	11	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kab. Kutai Kartanegara	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	100.000.000	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kab. Kutai Kartanegara	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	100.000.000
1	05	03	2, 04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				850.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				850.000.000

RANCANGAN AKHIR RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif
1	05	03	2, 04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah*	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah*	1 Dokumen	100.000.000
1	05	03	2, 04	03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana*	2 Dokumen	100.000.000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana*	2 Dokumen	100.000.000
1	05	03	2, 04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia*	1 Dokumen	150.000.000	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia*	1 Dokumen	150.000.000
1	05	03	2, 04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*	10 Laporan	300.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*	10 Laporan	300.000.000
1	05	03	2, 04	07	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi*	10 Orang	-	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi*	10 Orang	-

RANCANGAN AKHIR RKPD									HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif
										Bencana Kabupaten/Kota				
1	05	03	2, 04	08	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)*	15 Orang	-	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)*	15 Orang	-
1	05	03	2, 04	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana*	10 Kegiatan	100.000.000	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana*	10 Kegiatan	100.000.000

RANCANGAN AKHIR RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif
							Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan					*Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan*		
1	05	03	2, 04	12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana*	10 Laporan	-	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana*	10 Laporan	-
1	05	03	2, 04	14	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*	2 Dokumen	100.000.000	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*	2 Dokumen	100.000.000
1	05	03	2, 04	16	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	-

RANCANGAN AKHIR RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif
							sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun					*sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*		
					Jumlah				*11.415.591.573*	*Jumlah*				*11.415.591.573*

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pembangunan sekarang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai provider dan pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dan mengambil keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya melalui proses Musrenbang. Musrenbang adalah forum dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka, di situ ada proses timbal balik dalam proses pembangunan yang akan dilaksanakan adalah tentang bagaimana yang seharusnya dilakukan pemerintah serta sebaliknya yang harus dilakukan masyarakat dalam pembangunan yang akan dilaksanakan. Musrenbang adalah proses memajukan setiap daerah mulai dari Desa/kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga pusat.

Perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat tidak akan berhasil tanpa peran serta masyarakat didalam pembuatan perencanaan tersebut. Menyadari akan pentingnya peran serta masyarakarakat, pemerintah mengharuskan didalam pembuatan perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah dilakukan musyawarah secara berjenjang dari tingkat bawah. Proses tersebut diAkhir i dengan Musrenbang desa, Musrenbang kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan Musrenbang Provinsi dengan tujuan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang.

Musrenbang RKPD Kutai Kartanegara digelar dalam rangka menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas, dan sasaran pembangunan daerah propinsi, selain untuk mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten, serta guna menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah serta pendanaannya. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan atau masyarakat tahun 2025 hasil dari Musrenbang Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyepakati usulan Kegiatan dari Kecamatan yaitu :

Tabel. T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Kode	Usulan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA		Target (Volume dan Satuan)	Lokasi	Kebutuhan Dana (Rp)	KET	STATUS	ALASAN PERSETUJUAN
			Outcome	Output			APBD Kab/Kota			
BIDANG MUSRENBANG : PELAYANAN PUBLIK										
	1.05.04.2.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1,025,000,000			
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran					1,025,000,000			
	1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Kelompok /Relawan Pemadam Kebakaran	7 Kelompok Relawan		350,000,000			
		Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran / BALAKARCANA Kelurahan Sanga-Sanga Muara			15 orang	SANGA-SANGA	50,000,000		Disetujui	
		Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran / BALAKARCANA Desa Sebulu Ilir			15 orang	SEBULU	50,000,000		Disetujui	
		Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran / BALAKARCANA Kelurahan Ambarawang Darat			15 orang	SAMBOJA	50,000,000		Disetujui	

No	Kode	Usulan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA		Target (Volume dan Satuan)	Lokasi	Kebutuhan Dana (Rp)	KET	STATUS	ALASAN PERSETUJUAN
			Outcome	Output			APBD Kab/Kota			
		Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran / BALAKRCANA Desa Bangun Rejo			15 orang	TENGGARONG SEBERANG	50,000,000		Disetujui	
		Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran / BALAKARCANA Desa Tanjung Batu			15 orang	MUARA MUNTAI	50,000,000		Disetujui	
		Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran / BALAKARCANA Desa Makarti			15 orang	MARANG KAYU	50,000,000		Disetujui	
		Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran / BALAKARCANA Desa Sidomulyo			15 orang	ANGGANA	50,000,000		Disetujui	
	1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana Dan Prasarana	Tersediannya Sarana dan Prasarana Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran	9 paket		675,000,000			
		Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Desa Muara Kaman Ulu			1 paket	MUARA KAMAN	75,000,000		Disetujui	
		Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Desa Melintang			1 paket	MUARA WIS	75,000,000		Disetujui	
		Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Desa RT. 01 Kembang Janggut			1 paket	KEMBANG JANGGUT	75,000,000		Disetujui	

No	Kode	Usulan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA		Target (Volume dan Satuan)	Lokasi	Kebutuhan Dana (Rp)	KET	STATUS	ALASAN PERSETUJUAN
			Outcome	Output			APBD Kab/Kota			
		Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Kelurahan Sanga-sanga Muara			1 paket	SANGA-SANGA	75,000,000		Disetujui	
		Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Desa Muara Pantuan			1 paket	ANGGANA	75,000,000		Disetujui	
		Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Desa Jembayan Tengah			1 paket	LOA KULU	75,000,000		Disetujui	
		Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Desa Jantur Selatan			1 paket	MUARA MUNTAI	75,000,000		Disetujui	
		Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Desa Muara Belinau			1 paket	TABANG	75,000,000		Disetujui	
		Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Desa Kahala Ilir			1 paket	KENOHAN	75,000,000		Disetujui	
Jumlah Total							*1,025,000,000*			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Semangat Undang Undang Dasar 1945 memberikan amanat melalui pembangunan di bidang penanggulangan bencana bahwa bangsa Indonesia secara bersama-sama dan partisipatif diarahkan untuk senantiasa siap sedia dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai pemegang mandat pembangunan di bidang ini adalah: Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana.

Dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh Undang-undang nomor 24 tahun 2007 maka BNPB harus mampu mengoptimalkan peran koordinasi penanggulangan bencana dipusat dan daerah. Selain itu BNPB akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana secara sistematis dan bertahap yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya. Untuk itu, misi BNPB dirumuskan sebagai berikut :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Upaya pencapaian misi pembangunan tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar kementerian, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam BNPB sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.

Menindaklanjuti kebiajakan Nasional Bidang Penanggulangan Bencana dengan melakukan evaluasi pelaksanaan visi, misi dan tupoksi organisasi yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dan rencana aksi yang lebih cermat dan akurat dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi serta melakukan peningkatan pelayanan strategik meliputi kesiapsiagaan, kedaruratan dan rehabilitasi serta rekontruksi terhadap penanggulangan bencana dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Alternatif strategi yang disajikan di atas selanjutnya dipilih untuk ditetapkan menjadi strategi jangka menengah BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Strategi ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas bagi upaya-upaya yang diambil untuk mencapai sasaran jangka menengah BPBD . Pilihan strategi ini juga menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang tepat.

Tabel. 5

Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026

STRATEGI	KEBIJAKAN
A. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan 1. Meningkatkan inisiatif dan kapasitas penyusunan Peraturan Penanggulangan Bencana 2. Pembentukan dan Pemberdayaan Forum Pengurangan Risiko Bencana 3. Penyusunan Peraturan Penyebaran Informasi Kebencanaan 4. Implementasi Tataruang Berbasis Pengurangan Risiko Bencana 5. Meningkatkan Komitmen DPRD Terhadap Pengurangan Risiko Bencana dengan arah kebijakan	Mengarahkan pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunandan meninternalisasikan peraturan Penanggulangan Bencana kedalam Kebijakan pembangunan lainnya
B. Meningkatkan Pengkajian Risko dan Perencanaan Terpadu 1. Menyusun dan Mengimplementasikan Peta Penanggulangan Bencana 2. Evaluasi dan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Memperkuat Pendanaan Terhadap Dokumen Perencanaan
C. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik 1. Perkuatan Sarana Penyampaian Informasi Kebencanaan Kepada Masyarakat 2. Sosialisasi pencegahan kesipasiagaan bencana pada tingkat kecamatan	Perkuatan pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasionional

STRATEGI	KEBIJAKAN
3. Meningkatkan komunikasi bencana lintas lembaga, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha 4. Meningkat peran dan fungsi PUSDALOPS 5. Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan Penanggulangan Bencana 6. Melaksanakanakan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan 7. Meningkatkan manajemen pergudangan logistik penanggulangan bencana 8. Meningkatkan ketersediaan sandang, pangan dan sumber energi untuk darurat	
D. Meningkatkan penanganan tematik kawasan rawan bencana 1. Meningkatkan Penataan Ruang Berbasis PRB 2. Meningkatkan Kapasitas Rumah Sakit, sekolah, Madrasah dan Fasilitas Pelayanan Publik Lainnya Aman Bencana 3. Meningkatkan Kapasitas Desa Tangguh Bencana	Mengarahkan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam PRB
E. Peningkatan efektivitas pencegahan 1. Rehabilitasi Tanggul, Embung, Waduk dan Taman	
F. Pengembangan system pemulihan bencana 1. Meningkatkan Rehabilitasi dan Rekontruksi Infrasuktrur dan Pelayanan Publik pemerintah, Rumah Penduduk dan Penghidupan Masyarakat	
G. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan bencana 1. Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana 2. Peningkatan Sistem Peringatan Dini 3. Perkuatan Infrastruktur Evakuasi Bencana 4. Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat 5. Meningkatkan Kapasitas Perbaikan Darurat	Melibatkan Masyarkat dalam Proses Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Bencana. Tangguh, dimaknai sebagai kemampuan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mampu melenting dari keterpurukan akibat bencana ke arah pembangunan yang lebih baik. Tujuan tersebut bermuara kepada upaya melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku saat bencana. Serta peningkatan kapasitas dalam rangka menciptakan sistem penanggulangan bencana yang handal.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran dan bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya daerah dalam kegiatan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan sasaran sebagai berikut:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana

maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah:

Misi 1 : Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan 1 : Meningkatkan Kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana, dengan sasaran:

a. Meningkatnya sarana berupa perlengkapan dan peralatan Damkar;
b. Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur yang bersertifikasi;

c. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, kapasitas dan ketrampilan unsur pendidik dan pelajar untuk mengantisipasi ancaman bencana.

Tujuan 2 : Meningkatkan pencegahan ,pengurangan resiko bencana, peringatan dini dan mitigasi dalam menghadi ancaman bencana, dengan sasaran:

a. Ketersediaan Data/Informasi Kebencanaan;
b. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
c. Meningkatnya pengendalian operasional penanggulangan bencana di Kab. Kutai Kartanegara;
d. Mengurangi resiko kebakaran dengan revisi/rehabilitasi instalasi listrik;
e. Jenis Potensi Bencana.

Misi 2 : Meningkatkan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi serta pemulihan sarana dan prasarana.

Tujuan : Meningkatkan Upaya Tanggap Darurat Bencana, dengan sasaran:

a. Meningkatnya efektititas penanganan kedaruratan bencana;
b. Ketersediaan kebutuhan masyarakat pada saat terjadi bencana.

Misi 3 : Meningkatkan upaya perbaikan, pemulihan semua aspek pelayanan publik dan pembangunan kembali prasarana, sarana kelembagaan pemerintahan/ masyarakat pada wilayah pascabencana.

Tujuan 1 : Percepatan pemulihan kondisi kehidupan masyarakat (kedaruratan, rehabilitasi dan rekontruksi) pada wilayah pasca bencana, dengan sasaran:

a. Berfungsinya kembali sarana/prasarana (fasilitas umum) dan rumah masyarakat yang rusak akibat bencana;

b. Terbangunnya hunian sementara bagi korban bencana;
c. Meningkatnya penanganan keadaan darurat secara cepat dan tepat.

Tujuan 2 : Meningkatkan Kapasitas Pelayanan SKPD Penanggulangan Bencana Daerah, dengan sasaran:

a. Meningkatnya Peraturan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara;
b. Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran di SKPD Penanggulangan Bencana Kab. Kutai Kartanegara;
c. Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur SKPD Penanggulangan Bencana Daerah;
d. Meningkatnya kapasitas Sumberdaya Aparatur;
e. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Instansi.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja OPD hendaknya selaras dengan isu-isu strategis dan tema pembangunan, baik di level Kabupaten, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. Begitu halnya dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara harus menyusun Rancangan Rencana Kerja untuk mengatasi berbagai masalah. Selain itu, Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara harus dilaksanakan sesuai Rencana Aksi Penanggulangan Bencana, baik Nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur.

Terkait dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 2 (dua) program utama dan sebagai wujud dari tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Apabila program di setiap sasaran yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan, maka program dalam rencana strategis dapat ditindaklanjuti dengan memasukkannya ke dalam rencana kinerja. Jika program tidak dapat dilaksanakan seluruhnya di dalam tahun yang bersamaan, maka dapat ditempuh alternatif lain, yakni dengan membuat skala prioritas terhadap program yang akan dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan kondisi yang lebih mendukung di tahun tersebut

Target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum adalah berupaya Mewujudkan Ketangguhan Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Menghadapi Bencana. Target tersebut selaras dengan tema pembangunan 2021-2026 yaitu : “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”. Selain itu target kinerja yang nantinya berwujud rencana kerja dan kegiatan, selaras dengan perkembangan berbagai permasalahan yang berkembang berkait dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara. Permasalahan tersebut adalah:

1) Tingginya perhatian terhadap bencana, berikut upaya penanggulangannya dalam rangka menciptakan ketangguhan masyarakat terutama ketangguhan di sektor ketahanan ekonomi.
2) Masih banyaknya kerusakan dan kerugian akibat bencana di tahun sebelumnya yang belum di rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga mengganggu kehidupan dan penghidupan.
3) Pertumbuhan Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan mengakibatkan tumbuhnya pembangunan, hal tersebut harus mengindahkan upaya pengurangan resiko bencana.
4) Semakin tingginya tuntutan masyarakat untuk dilindungi dari ancaman bencana, ditandai dengan tingginya semangat dan partisipasi dari masyarakat untuk aktif terlibat dalam upaya penanggulangan bencana.
5) Kejadian bencana bisa datang setiap saat dan menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks, dan dimungkinkan menguras sumber daya yang besar.
6) BPBD selain menghadapi bencana Reguler di Kabupaten Kutai Kartanegara (Banjir, Karhutla, Tanah longsor, angin puting beliung, dsb), BPBD masih memiliki Pekerjaan Rumah tentang upaya pengurangan resiko bencana yang selama ini luput dari perhatian, sehingga dipastikan akan banyak menguras sumber daya yang ada.
7) Keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya sarana prasana, dan sumber daya biaya sehingga membuat tugas operasional menjadi terhambat.

Sementara yang dimaksud dengan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil Pemetaan terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun anggaran 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel. T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

Dan Perkiraan Maju Tahun 2026 (Rancangan Akhir)

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah		19.869.274.880,00					29.412.726.714	
1	5	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		1.000.000.000,00					500.000.000	
1	5	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	450.000.000,00	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		7	250.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	50.000.000,00	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	5	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	150.000.000,00	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik			50.000.000,00						
					Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			250.000.000,00						
					Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			50.000.000,00						
1	5	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.727.474.505,00					14.365.510.239	
1	5	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	700 org/bulan	9.201.474.505,00	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Orang/Bulan	13.874.510.239	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	5	1	2,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	86.000.000,00	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12	86.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24	25.000.000,00	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		24	360.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	6 laporan	360.000.000,00	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6 laporan	45.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			55.000.000,00						
1	5	1	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			297.500.000,00	Tenggarong	Dana Transfer Umum -		6	250.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
										Dana Alokasi Umum				
1	5	1	2,03	4	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	6 laporan	25.000.000,00					100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2,03	4	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6 laporan	100.000.000,00	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		50	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			30.000.000,00						
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			142.500.000,00						
1	5	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			480.000.000,00	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		15	825.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2,05	10	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	100 Orang	180.000.000,00					75.000.000	
1	5	1	2,05	11	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan*	10 Orang	75.000.000,00	Tenggarong	Dana Transfer		10	150.000.000	Badan Penanggulanga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
					Informasi Kepegawaian	*Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*				Umum - Dana Alokasi Umum				n Bencana Daerah
1	5	1	2,05	10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	3 Orang	75.000.000,00	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	5 Dokumen	75.000.000,00	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12	75.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	240 Paket	75.000.000,00	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12	375.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			880.000.000,00	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		30	1.175.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Penyediaan Komponen Instalasi	10	15.000.000,00	Tenggarong	Dana Transfer Umum -		12	10.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Dana Alokasi Umum				
1	5	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	55.000.000,00	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10	155.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	75.000.000,00	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10	155.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2,06	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	100.000.000,00					155.000.000	
1	5	1	2,06	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	85.000.000,00	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1	100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2,06	5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	100.000.000,00					100.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	5	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	300.000.000,00	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12	350.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jomlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	75.000.000,00	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12	75.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10	75.000.000,00					75.000.000	
1	5	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.394.083.900,00	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		66	8.104.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang*	2 Unit	250.000.000,00	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3	445.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	60 Unit	650.000.000,00	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		90	3.150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	100 Unit	2.494.083.900,00				120 unit	2.259.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.220.216.475,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		150	2.252.716.475	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	50 Laporan	15.000.000,00					7.500.000	
1	5	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	260.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		150	300.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	1.945.216.475,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	1.945.216.475	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	5	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.870.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	1.940.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	66 Unit	1.425.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	1.650.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	50 Unit	145.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			205.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	3 unit	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	85.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			5.475.000.000,00					5.500.000.000	
1	5	3	2,01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			450.000.000,00	Kab. Kutai	Dana Transfer Umum -		1	450.000.000	Badan Penanggulanga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
									Kartanegara	Dana Bagi Hasil				n Bencana Daerah
1	5	3	2,01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	150 orang	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2,01	3	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		20.792	300.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2,02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1.825.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		273	1.500.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	5	3	2,02	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	*Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya*	100 Unit	375.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2,02	18	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	*Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota*	500 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2,02	19	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam*	10 Keluarga	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		10 Keluarga	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	5	3	2,02	20	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	*Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana*	3 Kawasan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		4 Kawasan	200.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2,02	21	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan Akhir darurat bencana*	25 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2,02	22	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*	1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		4	250.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	5	3	2,02	26	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya*	2 laporan	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2,02	28	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana*	75 orang	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		350 orang	350.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2,03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	2.000.000.000,00					2.200.000.000	
1	5	3	2,03	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 laporan	150.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2,03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan	2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai	Dana Transfer Umum -		60	150.000.000	Badan Penanggulanga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
						Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat			Kartanegara	Dana Alokasi Umum				n Bencana Daerah
1	5	3	2,03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	20792 orang	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12	750.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2,03	7	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal*	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		75	250.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2,03	8	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	*Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis*	25 Orang	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		25	350.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2,03	9	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	273 orang	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4	250.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	5	3	2,03	10	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	3 laporan	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2,03	11	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2,04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			1.200.000.000,00					1.350.000.000	
1	5	3	2,04	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana didaerah*	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2,04	3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana*	2 Dokumen	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	5	3	2,04	4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	*Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia*	1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2,04	5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	*Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*	10 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10 Laporan	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2,04	7	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi*	10 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10 Orang	250.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2,04	8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)*	15 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		15 Orang	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	5	3	2,04	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	*Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan*	10 Kegiatan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10 Kegiatan	100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2,04	12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	*Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana*	10 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10 Laporan	100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2,04	14	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*	2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2,04	16	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan*	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
						sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun								
					Jumlah			*25.344.274.880,00*						

Bab V
P E N U T U P

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025. Proses penyusunan RKPD Tahun 2025 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah. mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
    1. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih dirasa belum memadai.
    2. Keberadaan kantor yang masih belum representatif untuk penyelenggaraan organisasi dalam rangka penanganan dan penanggulangan bencana. Kondisi ini menjadi kendala internal organisasi.
    3. Jumlah sumber daya aparatur bersertifikasi yang terbatas menjadikan kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam operasional organisasi dan penganganan bencana di daerah.
    4. intensitas bencana yang cukup tinggi yang didasari oleh kondisi topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
    5. Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan padahal hampir semua daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara rentan bencana.

b. Kaidah – kaidah pelaksanaan

    Dalam Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanggulangan Bencana terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan PerUndang- Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah merumusan dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penangganan Pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat,efektif dan efisien, serta Pengkoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana secara terarah,terpadu dan menyeluruh.

c. Rencana tindak lanjut

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, disusun berdasarkan program dan kegiatan pada bidang-bidang teknis dan usulan dari Hasil Musrenbang Kabupaten. Penyempurnaan matrik Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mewujudkan alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan rencana kinerja tahunan adalah *target setting* dari pencapaian indikator kinerja.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini disampaikan, sebagai acuan dan dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan serta sebagai alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan, efesiensi belanja dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

h.RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dalam rangka memenuhi pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Proses Penyusunan dokumen rencana kerja OPD (Renja OPD) tersebut memerlukan adanya koordinasi antar intansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang yang kemudian dilaksanakan forum OPD oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ini, sejumlah Peraturan digunakan sebagai rujukan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 120);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
25. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah untuk memberikan landasan strategis dalam kerangka pencapaian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai satu dokumen perencanaan Renja OPD akan digunakan sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pembangunan Tahun 2025 dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 tidak boleh dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, dalam hal ini tujuannya adalah :

1. Menyelaraskan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.
2. Mengetahui Perencanaan Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 untuk diusulkan kepada BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Menyelaraskan program dan kegiatan Dinas dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan.
4. Menyesuaikan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

Rencana Kerja OPD (Renja OPD) akan digunakan sebagai acuan pada penyusunan Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja-PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renja-PD, Dasar hukum Penyusunan, maksud dan tujuan serta Sistimatika Penulisan Renja-PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025.

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun lalu, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi oleh OPD serta Pemecahan Masalah.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional serta Tujuan dan sasaran Renja-PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja-PD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Program dan Kegiatan Renja-PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

4.1 Program dan Kegiatan

BAB IV. P E N U T U P

Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD.

Evaluasi pelaksanaan Renja-PD Tahun 2023 dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 melalui analisa terhadap kinerja output dan kinerja keuangan. Hal ini bertujuan untuk mengukur sejauhmana kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan keuangan yang telah direalisasi.

Dalam rangka memajukan masyarakat melalui pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program-program strategis. Dalam menjalankan program Pendidikan Anak Usia Dini didukung Bantuan Operasional Kabupaten (BOS Kab) yang bersumber dari APBD dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang bersumber dari APBN. Selain hal tersebut ditunjang dengan pembangunan sarana prasana lembaga/sekolah PAUD. Pelaksanakaan Program Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun yang menyasar untuk peningkatan mutu pendidikan SD dan SMP ditunjang dengan BOS Kabupaten (dana bersumber dari APBD) dan BOS Reguler (dana bersumber dari APBN). Selain hal tersebut juga ditunjang dengan kegiatan pembangunan sarana prasarana lembaga/sekolah SD dan SMP.

Program Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang berupa peningkatan sumber daya Tenaga Pendidik dan Kependidikan seperti pelatihan dan lain-lainnya bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dan Program Pelestarian Cagar Budaya dan Budaya Daerah, yang bertujuan untuk pembinaan seni budaya, perlindungan karya seni, melestarikan museum benda-benda situs/cagar budaya, dan peningkatan kerjasama dalam pengelolaan budaya. Pembangunan Sarana Prasarana dari tingkat satuan pendidikan PAUD, SD, SMP dan Non Formal/Kesetaraan telah dilaksanakan termasuk penambahan sarana bagi satuan pendidikan/sekolah yang masih kekurangan. Seiring dengan upaya mendorong kinerja pendidik, kesejahteraan pendidik juga terus

ditingkatkan, serta mengembangkan kualitas pendidik dan lembaga pendidikan melalui akreditasi satuan pendidikan dan sertifikasi pendidik.

1. Faktor penyebab terjadinya kondisi capaian kinerja.

   Faktor penyebab terjadinya capaian kinerja pada masing-masing kategori di atas secara umum antara lain adalah:

   a. Capaian Indikator kinerja yang realisasinya di bawah target disebabkan antara lain:

   1) Turunnnya capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP

      Hal ini dimungkinkan karena dasar perhitungan yang membentuk angka APM SD dan SMP tersebut berfluktuatif.

   2) Pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun faktor penyebabnya antara lain adalah:

      a) Banyak anak pindah sekolah menjelang ujian nasional.
      b) Belum terpenuhinya ketersediaan sekolah dikarenakan jumlah penduduk yang tidak merata di setiap desa, letak geografis wilayah yang berjauhan dan akses yang tidak memadai.
      c) Masih banyaknya kondisi bangunan sekolah yang tidak memadai.

   3) Pada program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan antara lain adalah:

      a) Banyak pendidik dan tenaga kependidikan masih melaksanakan proses perkuliahan.
      b) Banyaknya pendidik yang belum mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang berpengaruh terhadap kualitas tenaga pendidik.

   4) Pada program Pelestarian Cagar Budaya dan Budaya Daerah antara lain adalah :

      a) Masih rendahnya perhatian pemerintah terhadap pelestarian situs-situs cagar budaya.
      b) Masih rendahnya minat masyarakat khususnya pelajar dalam mengikuti program kesenian daerah.
      c) Kurangnya pertunjukan-pertunjukan kesenian daerah yang mengangkat seni budaya daerah.

b. Capaian indikator kinerja yang realisasinya melebihi target didukung antara lain:
   1) Adanya kebijakan sekolah gratis lewat program BOS
   2) Rata-rata SD dan SMP sudah menerapkan SPM dalam hal jumlah siswa per kelas;
   3) Program sertifikasi mendorong guru aktif memenuhi syarat- syarat akademis dan Penilitian Tindakan Kelas (PTK) sesuai dengan tuntutan peraturan yang berlaku.

2. Implikasi terhadap capaian program dalam renstra.

   Dengan capaian kinerja pada 2023 yang terbagi dalam 2 kategori, yaitu capaian yang tidak sesuai target dan capaian yang melebihi target, maka implikasi terhadap potensi capaian kinerja program dan kegiatan pada akhir Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

   a. Bagi program dan kegiatan yang capaian kinerja di bawah target pada 2023, kemungkinan pada Tahun 2024 akan terulang kondisi yang sama, yaitu target kinerja untuk indikator yang sama tidak akan tercapai sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen renstra. Sebaliknya untuk program dan kegiatan yang melebihi target, maka di Tahun 2024 diperkirakan akan mengalami kenaikan capaian. Oleh karena itu untuk menetapkan target kinerja pada Tahun 2024 harus ada penyesuaian angka indikator dimasing-masing program kegiatan;
   b. Untuk mengoptimalkan capaian target kinerja sasaran pada program-program prioritas, harus ada upaya perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap capaian kinerja hasil di masing-masing program seperti pembangunan RKB, rehabilitasi ruang kelas, Pembangunan Laboratorium, Pembangunan Ruang Kantor, Pembangunan Toilet, Pembangunan Pagar, Pembangunan UKS, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Gudang, Pembangunan Lapangan Upacara/ Area Olahraga Sekolah, Pengadaan Meubelair dan Lain-lainnya. Selain kegiatan fisik, kegiatan nonfisik seperti Sertifikasi Guru, Peningkatan Kualifikasi dan Pendidikan Profesi Guru (PPG),

perlu diupayakan lebih optimal lagi untuk percepatan pemenuhan target-target Renstra di periode 5 (lima) tahun berikutnya. Berdasarkan realisasi capaian kinerja 2021 dan perkiraan capaian Tahun 2024, potensi tingkat ketercapaian target kinerja program dan kegiatan pada Tahun ke-lima Renstra berkisar 60% - 80%. Pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, pencapaian Renstra bervariasi. Untuk indikator APK/APM ada yang mencapai di atas 100%, tapi juga ada yang di bawah 100%, sementara indikator kondisi ruang kelas baik SDN dan SMPN masing-masing hanya mencapai 50% dan 80% pada akhir tahun 2023, dan untuk dua indikator ini diharapkan akan meningkat lagi capaiannya pada akhir tahun 2024. Perkiraan realisasi tingkat pencapaian kinerja sasaran hasil Tahun 2021 terhadap target Tahun 2024 (Renstra periode 5 tahun) dapat dilihat pada Tabel T-C. 29.

Tabel T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)*

Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama OPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X	X X	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	Nilai	67	67	67	100,00	69	203	270,67
X	X X	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	40	Dokumen	4	8	8	100,00	4	16	40,00
X	X X	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	10	Dokumen	2	1	1	100,00	1	4	40,00
	X X	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen	5	Dokumen	2	2	2	100,00		4	80,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	X X	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen	5	Dokumen	0			-		-	0,00
X	X X	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	15	Dokumen	6	3	3	100,00	3	12	80,00
X	X X	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	5	Dokumen	1	1	1	100,00		2	40,00
X	X X	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	359542	1. Dokumen 2. Orang/Bulan	72565	71966	71966	100,00	71894	216.425	60,19
X	X X	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	359460	Orang/Bulan	129.022,00	57130	57130	100,00	71.892,00	258.044	71,79
X	X X	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	72	Dokumen	3962	72	72	100,00	3890	7.924	11005,56

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
X	X X	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	dokumen	2	1	1	100,00	1	4	80,00
X	X X	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	5	dokumen	2	1	1	100,00	1	4	80,00
X	X X	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Aset Perangkat Daerah	4820	Dokumen	928	37	37	100,00	928	1.893	39,27
X	X X	01	2,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	180	Laporan	125	85	85	100,00	40	250	138,89

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X	X X	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	4640	Dokumen	125	124	124	100,00	1	250	5,39
X	X X	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pegawai PNS dan Non PNS Perangkat Daerah	3595	orang	650	511	511	100,00	771	1.932	53,74
X	X X	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2540	orang	1200	300	300	100,00	900	2.400	94,49
X	X X	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang dilakukan pembinaan	350	orang	134	70	70	100,00	64	268	76,57
X	X X	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen	215	orang	43	43	43	100,00	0	86	40,00
X	X X	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang dilatih	490	Peserta	17	7	7	100,00	10	34	6,94
X	X X	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	115929	Buah	25908	21.097	21.097	100,00	23708	70.713	61,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X	X X	01	2,0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	125	buah	6686	894	894	100,00	5792	13.372	10697,60
X	X X	01	2,0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	814	buah	2208	2208	2208	100,00		4.416	542,51
X	X X	01	2,0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	22500	Buah	1545	1465	1465	100,00	80	3.090	13,73
X	X X	01	2,0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	77500	Lembar	91757	3304 0	33040	100,00	58717	183.514	236,79

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X	X X	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	3500	Media	336			-	336	672	19,20
X	X X	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	400	orang	0			-	0	-	0,00
X	X X	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	1090	orang	359	359	359	100,00		718	65,87
X	X X	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah penataan arsip keuangan	10000	buah	2000			-	2000	4.000	40,00
X	X X	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	140	unit	28	20	20	100,00	268,00	316	225,71
X	X X	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD	140	unit	333,00	65	65	100,00	268,00	666	475,71

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya									
X	X X	01	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	31475	Bulan/Orang	73848	6135	6135	100,00	73848	153.831	488,74
X	X X	01	2,0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD Dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	20	Bulan / Rekening	8	4	4	100,00	4	16	80,00
X	X X	01	2,0 8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD Dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	800	Unit	-			-		-	0,00
X	X X	01	2,0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran bagi Pegawai Non PNS : Guru, Dosen, Pegawai Administrasi dan Pegawai Teknis Lainnya	30655	Orang	81633	6297	6297	100,00	75336	163.266	532,59

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X	X X	01	2,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana Prasarana yang dilakukan pemeliharaan	2640	Unit	582	528	528	100,00	137	1.247	47,23
X	X X	01	2,0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	50	Buah	16	7	7	100,00	9	32	64,00
X	X X	01	2,0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	2400	Unit	11	10	10	100,00	1	22	0,92
X	X X	01	2,0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	150	Unit	375	285	285	100,00	90	750	500,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X	XX	01	2,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah sistem jaringan yang dipelihara dan dikembangan	15	Sistem	5	3	3	100,00	2	10	66,67
X	XX	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk mendukung kepada pelayanan masyarakat	25	Unit	36	1	1	100,00	35	72	288,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD (Angka Indeks Max 7)	90,71	Presentase	88,42%	85,86	85,86	100,00	87	87	95,91
						Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP (Angka Indeks Max 7)	89,71	Presentase	85,57%	84,86	84,86	100,00	86	86	95,86
						Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Paud (Angka Indeks Max 7)	83,92	Presentase	83,92	78,72	78,72	100,00	80,6	80,6	96,04
						Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP)	69,28	Presentase	72,31%	64,08	64,08	100,00	65,98%	65	94,49

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Kesetraan (Angka Indeks Max 7)									
						Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar IDAMAN Pendidikan Dasar	15000	orang	0	3000	2204	73,47	3000	5.204	34,69
1	01	02	2,01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Standar kompetensi lulusan Pendidikan Sekolah Dasar	93,89 %	Presentase	92,35%	88,86	88,86	100,00	90,38%	91	9658,89
						Standar isi Pendidikan Sekolah Dasar	89,60 %	Presentase	88,06%	84,57	84,57	100,00	86,09%	86	9632,98
						Standar proses Pendidikan Sekolah Dasar	96,18 %	Presentase	94,64%	91,15	91,15	100,00	92,67%	93	9671,77
						Standar sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Dasar	86,60 %	Presentase	85,06%	81,57	81,57	100,00	83,09%	83	9613,34
						Standar pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	99,18 %	Presentase	97,64%	94,15	94,15	100,00	95,67%	96	9687,75
						Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	77,18 %	Presentase	75,64%	72,15	72,15	100,00	73,67%	74	9541,73

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Standar pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar	90,03 %	Presentase	88,49%	85	85	100,00	86,52%	87	9635,69
						Standar penilaian Pendiidkan Sekolah Dasar	87,03 %	Presentase	85,49%	82	82	100,00	83,52%	84	9616,24
1	01	02	2,01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas yang dibangun	31	ruang	27	31	52	167,74	27	106	341,94
1	01	02	2,01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang kantor yang dibangun	20	Ruang	2	6	6	100,00	1	9	45,00
1	01	02	2,01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang kesehatan siswa SD yang dibangun	8	ruang	15	3	3	100,00	12	30	375,00
1	01	02	2,01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah tersedianya gedung membaca siswa SD	43	ruang	18	43	10	23,26	15	43	100,00
1	01	02	2,01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	58	unit	21	15	15	100,00	16	52	89,66
1	01	02	2,01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	29	ruang	16	29	29	100,00	13	58	200,00
1	01	02	2,01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang kantor yang direhab	3	ruang	0	3	3	100,00		3	100,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	02	2,01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah rumah dinas/mess sekolah yang direhab	4	rumah	6	4	4	100,00		10	250,00
1	01	02	2,01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Tersedianya meubel sekolah	7764	set	13348	7764	14360	184,96	11215	38.923	501,33
1	01	02	2,01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa	10000	Siswa	1063	2000	2000	100,00	2000	5.063	50,63
1	01	002	2.01	022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan			1529		4050	-		5.579	-
1	01	02	2,01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				0			-		-	-
						Jumlah siswa yang mengikuti Ujian Sekolah	7300	Siswa	14310			-	120	14.430	197,67
						Jumlah siswa yang mengikuti Ujian Sekolah	5200	Siswa	120			-	120	240	4,62
						Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek Fasililator	400	Peserta	90			-	90	180	45,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah sekolah / Kepala Sekolah / Guru / Pengawas dalam peningkatan pembinaan kurikulum yang diterapkan pada Satuan Pendidikan	400	sekolah	115			-	115	230	57,50
						Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek Pembelajaran	500	Peserta	90			-	90	180	36,00
1	01	02	2,01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan PPDB Berbasis Online	2195	Sekolah	949	439	439	100,00	473	1.861	84,78
1	01	02	2,01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				0	634	634	100,00		634	-
						Jumlah Siswa SD yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade	1820	Siswa	1430			-	310	1.740	95,60
						Jumlah Sekolah yang mengikuti penguatan pendidikan	100	Sekolah	200			-	200	400	400,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba GEMA	500	Siswa	126			-	126	252	50,40
1	01	02	2,01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru yang Menjadi PPPK SD	640	Orang	0			-	0	-	0,00
1	01	02	2,01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				0			-		-	-
						Jumlah Guru SD Yang Mendapatkan Beasiswa Kualifikasi S-1	990	Orang	0			-	0	-	0,00
						Jumlah Guru dan Plt. Kepala Sekolah yang memiliki Sertifikat (NUKS)	270	Orang	129			-	99	228	84,44
						Jumlah Guru SD yang memiliki Sertifikat Pendidik	394	Orang	153			-	153	306	77,66

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Guru SD yang memiliki keterampilan guru inklusif	120	Orang	0			-	0	-	0,00
1	01	02	2,01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				0			-		-	-
						Jumlah sekolah yang mengikuti lomba	120	Sekolah	29	100	120	120,00	29	178	148,33
						Jumlah sekolah yang mengikuti lomba	160	Sekolah	0	100	160	160,00		160	100,00
1	01	02	2,01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah penerima BOS Kabupaten	470580	Siswa	185.949	472	472	100,00	92.805	279.226	59,34
1	01	02	2,01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				0			-		-	-
						Jumlah sekolah dalam mempertanggungjawabkan Dana BOS SD	2360	Sekolah	945	472	472	100,00	472	1.889	80,04
						Jumlah sekolah dalam mempertanggungjawabkan dana BOS SD	2360	Sekolah	472	472	472	100,00	472	1.416	60,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	02	2,02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Standar kompetensi lulusan Pendidikan SMP	91,32 %	persentase	89,78%	86,29	86,29	100,00	87,81%	88	9643,66
						Standar isi Pendidikan SMP	86,89 %	persentase	85,35%	81,86	81,86	100,00	83,38%	84	9615,30
						Standar proses Pendidikan SMP	93,89 %	persentase	92,35%	88,86	88,86	100,00	90,38%	91	9658,89
						Standar sarana dan prasarana Pendidikan SMP	81,75 %	persentase	80,21%	76,72	76,72	100,00	78,24%	78	9578,53
						Standar pengelolaan Pendidikan SMP	94,46 %	persentase	92,92%	89,43	89,43	100,00	90,95%	91	9662,15
						Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	77,75 %	persentase	76,21%	72,72	72,72	100,00	74,24%	74	9546,56
						Standar pembiayaan Pendidikan SMP	88,32 %	persentase	86,78%	83,29	83,29	100,00	84,81%	85	9624,76
						Standar penilaian Pendidikan SMP	82,46 %	persentase	80,92%	77,43	77,43	100,00	78,95%	79	9583,88
1	01	02	2,02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas yang dibangun	22	Ruang	2	5	5	100,00	1	8	36,36
1	01	02	2,02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Bangunan ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS)	4	Ruang	1	4	12	300,00	0	13	325,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	02	2,02	06	Pembangunan Laboratorium	Terbangunnya gedung/ruang laboratorium	9	Ruang	15	21	21	100,00	0	36	400,00
1	01	02	2,02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SMP	23	unit	7	12	20	166,67	1	28	121,74
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kantor yang direhab			43	2	2	100,00		45	-
1	01	002	2.02	017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang yang direhabiitasi			3			-		3	-
1	01	002	2.02	018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah	Jumlah ruang yang direhabiitasi			6			-		6	-
1	01	002	2.02	024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana prasarana yang direhabiitasi			2			-		2	-
1	01	02	2,02	025	Pengadaan Mebel Sekolah	Tersedianya meubel sekolah	6060	Set	13876	24	24	100,00	9396	23.296	384,42
1	01	002	2.02	027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan sekolah yang diadakan			1	5	5	100,00		6	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	02	2,02	032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa	5075	Siswa	1141			-	0	1.141	22,48
1	01	002	2.02	035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan			23741	3	987	32.900,00		24.728	-
1	01	02	2,02	036	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				0			-		-	-
						Jumlah Nilai Rata-Rata KKM Peserta Didik Kelas VIII	48500	Peserta	5200	5200	5200	100,00		10.400	21,44
						Jumlah Kelulusan Peserta Didik Jenjang SMP	38800	Peserta	0			-		-	0,00
						Peningkatan literasi Membaca Peserta Didik Jenjang SMP	580	Sekolah	0			-		-	0,00
						Jumlah perangkat pembelajaran guru pada	6400	orang	0			-		-	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						masing-masing mata pelajaran Jenjang SMP									
						Aplikasi AKM Kelas, Jumlah Video Pembelajaran dan Manajemen Berbasis Sekolah yang Baik	5	Sistem	0			-		-	0,00
1	01	02	2,02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				0			-		-	-
						Jumlah Sekolah yang Melaksanakan PPDB Berbasis Online	285	Sekolah	179	90	90	100,00	89	358	125,61
						Jumlah Peserta Didik yang Memiliki Kartu Indonesia Pintar	32704	Siswa	4142			-	4142	8.284	25,33
1	01	02	2,02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				-			-		-	-
						Jumlah Peserta yang Mengikuti Lomba	1500	Siswa	997	510	510	100,00	487	1.994	132,93

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Peserta yang Mengikuti Lomba	750	Siswa	172			-	172	344	45,87
						Jumlah Peserta yang Mengikuti Lomba	400	Siswa	68			-	68	136	34,00
						Jumlah Peserta yang Mengikuti Lomba	300	Siswa	247			-	247	494	164,67
						Jumlah Peserta yang Mengikuti Lomba	100	Sekolah	3			-	3	6	6,00
						Jumlah Peserta yang Mengikuti Penguatan Pendidikan Karakter	800	Siswa	216			-	216	432	54,00
1	01	02	2,02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				-			-		-	-
						Jumlah Guru SMP yang memiliki Kualifikasi Sarjana (S1)	550	Guru	-			-		-	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Guru Agama Islam yang memiliki Kompetensi Dalam Pelaksanaan GEMA	200	orang	0			-		-	0,00
						Jumlah Tenaga Laboran SMP	150	Orang	-			-		-	0,00
						Jumlah Tenaga Pustakawan SMP	150	Orang	0			-		-	0,00
						Jumlah Tenaga Operator SMP	120	Orang	-			-		-	0,00
						Jumlah Guru SMP yang memiliki keterampilan guru inklusif	40	orang	0			-		-	0,00
						Jumlah Guru SMP yang memiliki Sertifikat Pendidik	75	orang	15	15	15	100,00	-	30	40,00
						Jumlah Kepala SMP yang mengikuti seleksi Kepsek Unggulan	105	orang	0			-		-	0,00
						Jumlah Kepala SMP yang mengikuti Diklat Calon Kepsek Unggulan	120	orang	-			-		-	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	02	2,02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang dibina	408	Sekolah	46			-	46	92	22,55
1	01	02	2,02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah penerima BOS Kabupaten	205000	Siswa	66.759	41268	41268	100,00	25.491	133.518	65,13
1	01	02	2,02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				-			-		-	-
						Jumlah sekolah dalam mempertanggungjawabkan Dana BOS SMP	975	sekolah	344	201	201	100,00	143	688	70,56
						Peningkatan kualitas pengelolaan dana BOS SMP/MTs	780	sekolah	143			-	143	286	36,67
1	01	02	2,03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan PAUD	90,78 %	Persentase	89,24%	82,89	82,89	100,00	87,27%	85	9325,30
						Standar Isi Pendidikan PAUD	92,53 %	Persentase	90,99%	84,64	84,64	100,00	89,02%	86	9341,85

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Standar Proses Pendidikan PAUD	99,44 %	Persentase	97,90%	91,55	91,55	100,00	95,93%	93	9401,48
						Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	44,79 %	Persentase	63,78%	36,9	36,9	100,00	41,28%	38	8473,01
						Standar Sarana Prasana Pendidikan PAUD	74,93 %	Persentase	74,39%	67,04	67,04	100,00	71,42%	68	9141,61
						Standar Pengelolaan Pendidikan PAUD	93,80 %	Persentase	92,26%	85,91	85,91	100,00	90,29%	88	9353,46
						Standar Pembiayaan Pendidikan PAUD	84,50 %	Persentase	82,96%	76,61	76,61	100,00	80,99%	78	9260,30
						Standar Penilaian Pendidikan PAUD	88,10 %	Persentase	86,56%	80,21	80,21	100,00	84,59%	82	9298,69
1	01	02	2,03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang yang dibangun	15	ruang	16	8	8	100,00	8	32	213,33
1	01	02	2,03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sekolah yg dibangun Toilet/wc siswa	21	Unit	23	1	1	100,00	22	46	219,05
1	01	02	2,03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sekolah yang direhabilitasi	5	sekolah	8	1	1	100,00	7	16	320,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD										
1	01	02	2,03	07	Pengadaan Mebel PAUD				-			-		-	-
						Jumlah Meja guru yang tersedia	750	buah	24			-	24	48	6,40
						Jumlah kursi guru yang tersedia	750	buah	24			-	24	48	6,40
						Jumlah kursi siswa yang tersedia	2000	buah	240			-	240	480	24,00
						Jumlah Meja siswa yang tersedia	800	set	110	70	70	100,00	40	220	27,50
						Jumlah Rak Buku yang tersedia	400	buah	8			-	8	16	4,00
						Jumlah Rak Tempat Minum Anak yang tersedia	400	buah	8			-	8	16	4,00
						Jumlah Rak Tas Anak yang tersedia	400	buah	2			-	2	4	1,00
						Jumlah Lemari File yang tersedia	160	buah	8			-	8	16	10,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Papan Tulis yang tersedia	400	buah	8			-	8	16	4,00
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan			728	728	728	100,00		1.456	-
1	01	02	2,03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah perlengkapan siswa yang diadakan	120	paket / sekolah	-			-		-	0,00
1	01	02	2,03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				0			-		-	-
						Jumlah Peserta	800	peserta	440	240	240	100,00	200	880	110,00
						Jumlah Peserta	500	peserta	316			-	316	632	126,40
						Jumlah Peserta	500	peserta	125			-	125	250	50,00
						Jumlah Peserta	800	peserta	170			-	170	340	42,50
						Jumlah Peserta	240	peserta	240			-		240	100,00
						Jumalah Masyarakat yang mengikuti parenting	500	orang	-			-		-	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Peserta	2256	Siswa	-			-		-	0,00
1	01	02	2,03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD				0			-		-	-
						Jumlah orang tua dari keluarga	1000	Peserta	100	100	100	100,00		200	20,00
						Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti penguatan pendidikan karakter	400	Peserta	-			-		-	0,00
1	01	02	2,03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				0			-		-	-
						Jumlah Guru PAUD yang memiliki Kualifikasi Sarjana (S1)	2264	Orang	91			-	495	586	25,88

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Guru dan Plt. Kepala Sekolah yang memiliki Sertifikat (NUKS)	40	Orang	9			-	9	18	45,00
						Jumlah Guru PAUD yang memiliki Sertifikat Pendidik	50	Orang	105	15	15	100,00	90	210	420,00
1	01	02	2,03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				-			-		-	-
						Jumlah lembaga yang dibina	200	Lembaga	0			-	0	-	0,00
						Jumlah lembaga yang diakreditasi	200	Lembaga	66			-	66	132	66,00
1	01	02	2,03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah bantuan operasional sekolah kabupaten	97235	siswa	41787	25236	25236	100,00	16551	83.574	85,95
1	01	02	2,03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah lembaga yang dilakukan pendampingan dalam pengelolaan bantuan operasional	2820	PAUD	564	564	564	100,00	1.146	2.274	80,64
1	01	02	2,04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Melek Huruf	99,99	persentase	99,94%	99,95	99,95	100,00	99,96%	102	101,96

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Standar Kompetensi Kelulusan Pendidikan Kesetaraan	69,67 %	persentase	68,13%	64,64	64,64	100,00	66,16%	66	9470,78
						Standar Isi Pendidikan Kesetaraan	73,57 %	persentase	72,03%	68,54	68,54	100,00	70,06%	70	9509,43
						Standar Proses Pendidikan Kesetaraan	73,53 %	persentase	71,99%	68,5	68,5	100,00	70,02%	70	9509,06
						Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan	66,48 %	persentase	64,94%	61,45	61,45	100,00	62,97%	63	9435,79
						Standar Sarana Prasana Pendidikan Kesetaraan	68,24 %	persentase	66,70%	63,21	63,21	100,00	64,73%	65	9455,50
						Standar Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	68,53 %	persentase	66,99%	63,5	63,5	100,00	65,02%	65	9458,65
						Standar Pembiayaan Pendidikan Kesetaraan	63,33 %	persentase	67,78%	58,3	58,3	100,00	59,82%	60	9407,23
						Standar Penilaian Pendidikan Kesetaraan	68,38 %	persentase	66,84%	63,35	63,35	100,00	64,87%	65	9457,02
1	01	02	2,04	01	Pembangunan Gedung/Ruang	Jumlah ruang yang dibangun	20	ruang	-			-		-	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan										
1	01	02	2,04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Bangunan Sapras utilitas	12	ruang	4	4	4	100,00		8	66,67
1	01	02	2,04	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah ruang yang direhab	17	ruang	-			-		-	0,00
1	01	02	2,04	07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah meubel	1000	set	105	105	105	100,00		210	21,00
1	01	02	2,04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Siswa	12	paket	-			-		-	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	02	2,04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa	1000	Siswa	2087	1000	0	-	2087	4.174	417,40
1	01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan			525	525	525	100,00		1.050	-
1	01	02	2,04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta yang dibina	10540		300	300	300	100,00		600	5,69
						jumlah siswa yang mengikuti ujian	4500	orang	1300			-	1300	2.600	57,78
						Jumlah peserta yang dibina	100	Lembaga	100			-		100	100,00
						Jumlah peserta yang dibina	200	orang	200			-		200	100,00
						Jumlah peserta yang dibina	2000	orang	-			-		-	0,00
						Jumlah peserta yang dibina	800	orang	-			-		-	0,00
						Jumlah peserta yang dibina	2700	orang	40			-	40	80	2,96
						Jumlah peserta yang dibina	240	orang	-			-		-	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	02	2,04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				-			-		-	-
						Jumlah peserta yang dibina	160	Lembaga	0			-		-	0,00
						Jumlah peserta yang dibina	200	orang	-			-		-	0,00
						Jumlah peserta yang dimonev	120	orang	-			-		-	0,00
1	01	02	2,04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta yang dibina	400	Lembaga	0			-		-	0,00
1	01	02	2,04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah bantuan operasional sekolah kabupaten	12870	orang	2.574	2574	2574	100,00	154	5.302	41,20
1	01	02	2,04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang dilakukan pendampingan dalam pengelolaan bantuan operasional	450	lembaga	20	20	20	100,00	100	140	31,11

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan Muatan Lokal (Mulok)	100%	Presentase		10	10	100,00		10	1000,00
1	01	03	2,01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersedianya kurikulum Muatan Lokal bagi jenjang pendidikan SD	1	dokumen		1	1	100,00	1	2	200,00
						Tersedianya kurikulum Muatan Lokal bagi jenjang pendidikan SMP	1	dokumen		1	1	100,00	1	2	200,00
						Tersedianya perangkat pembelajaran kurikulum muatan lokal jenjang SD	1	dokumen		1	1	100,00	1	2	200,00
						Tersedianya perangkat pembelajaran kurikulum muatan lokal jenjang SMP	1	dokumen		1	1	100,00	1	2	200,00
1	01	03	2,01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen Kompetensi Dasar Muatan Lokal jenjang SD dan SMP	10	dokumen	9	9	9	100,00		18	180,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	03	2,01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen silabus muatan lokal SD dan SMP	10	dokumen	9	9	9	100,00		18	180,00
1	01	03	2,01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku teks muatan lokal SD dan SMP	8000	Eksemplar	-			-		-	0,00
1	01	03	2,01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah guru SD dan SMP dalam mengimplementasi pembelajaran muatan lokal	120	orang	-			-		-	0,00
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Presentase terpenuhinya jumlah guru	97%	Persentase				-		-	0,00
1	01	04	2,01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan	Rasio Guru dengan Peserta didik PAUD	1 : 15	rasio	1 : 10	1 : 10	1 : 10	100,00	1 : 10	0	280,00
					Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Guru dengan Peserta didik SD	1 : 24	rasio	1 : 16	1 : 16	1 : 16	100,00	1 : 16	0	271,43
						Rasio Guru dengan Peserta didik SMP	1 : 26	rasio	1 : 16	1 : 16	1 : 16	100,00	1 : 16	0	265,12
1	01	04	2,01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan	Jumlah dokumen analisis peta mutu dan jumlah guru yang dihasilkan	16	dokumen				-		-	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan										
1	01	04	2,01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PTK yang ditata	1000	orang				-		-	0,00
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dan izin operasional	100%	Persentase		100	100	100,00		100	10000,00
1	01	05	2,01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan izin pendirian dan operasional sekolah	57	dokumen				-	64	64	112,28
1	01	05	2,01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar	Jumlah lembaga yang di verifikasi	112	lembaga				-		-	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					yang Diselenggarakan oleh Masyarakat										
1	01	05	2,01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah lembaga yang dimonitoring	120	lembaga				-		-	0,00
1	01	05	2,02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan izin pendirian dan operasional sekolah	100	dokumen	2	80	80	100,00	100	182	182,00
1	01	05	2,02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah lembaga yang di verifikasi	700	lembaga	100	100	100	100,00		200	28,57
1	01	05	2,02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang	Jumlah lembaga yang dimonitoring	600	lembaga				-		-	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Diselenggarakan oleh Masyarakat										
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Cakupan sekolah yang menggunakan bahasa daerah sebagai mata pelajaran	100%	Persentase				-		-	0,00
1	01	06	2,01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya program pembudayaan bahasa dan sastra daerah dijenjang sekolah SD	300	sekolah		80	80	100,00	160	240	80,00
						Terlaksanannya program pembudayaan bahasa dan sastra daerah dijenjang sekolah SMP	106	sekolah		30	30	100,00	60	90	84,91
						Jumlah penutur muda bahasa daerah	4060	orang		1100	1100	100,00	2200	3.300	81,28
						Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah	5	kali kegiatan		5	5	100,00	5	10	200,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	06	2,01	01	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang dihasilkan	4000	Eksemplar				-		-	0,00
1	01	06	2,01	02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang mengangkat bahasa dan sastra daerah sebagai mata pelajaran	0	Kegiatan				-		-	-
1	01	06	2,01	03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan publikasi	8	Kegiatan				-		-	0,00
1	01	06	2,01	04	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tokoh yang diberikan penghargaan	8	orang				-		-	0,00
1	01	06	2,01	05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Jumlah buku yang di distribusikan	12000	Eksemplar				-		-	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	06	2,01	06	Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan lomba	1600	orang				-		-	0,00
1	01	06	2,01	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah modul dan bahan ajar yang didistribusikan	12000	Eksemplar				-		-	0,00
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Pelaksanaan Event Budaya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	110	Event		2	2	100,00		2	1,82
						Persentase Desa Budaya yang Aktif (Existing 5 Desa Budaya)	100%	Persentase		100	100	100,00	100	200	20000,00
2	22	02	2,02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana pelestarian Seni dan Tradisi budaya lokal yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelakunya	15	kegiatan	5	5	5	100,00	10	20	133,33

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	22	02	2,02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Tradisi Budaya yang di lindungi,dikembangkan dan dimanfaatkan .	9	Kegiatan	3	3	3	100,00		6	66,67
								set				-		-	-
								set				-		-	-
								set				-		-	-
2	22	02	2,02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Dibina	80	orang	20			-	20	40	50,00
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase Lembaga Seni Budaya Yang Aktif	80%	presentase		50	50	100,00		50	6250,00
2	22	03	2,01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelestarian kesenian daerah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelakunya	15	kegiatan	8	8	8	100,00	10	26	173,33

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	22	03	2,01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Tersedianya Penggiat/ pelaku kesenian yang berkualitas	200	Orang	-	100	127	127,00	126	253	126,50
2	22	03	2,01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah pelaku kesenian yang dibina dan mendapatkan sertifikasi sesuai dengan standar	90	orang	-	100	0	-	60	60	66,67
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Presetase Sejarah lokal yang dilestarikan	78,67 %	persentase				-		-	0,00
2	22	04	2,01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelestarian sejarah, tradisi dan budaya lokal	20	kegiatan		8	8	100,00	12	20	100,00
2	22	04	2,01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah masyarakat yang mengakses data dan informasi sejarah	120	orang	1			-	1	2	1,67
2	22	05				Persentase Cagar Budaya yang dipelihara	100%	persentase		100	100	100,00		100	10000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	(Berdasarkan SK Penetapan)									
						Presentase Penetapan Cagar Budaya Potensial (SK Bupati)	19,60	persentase		0	0	-		-	0,00
						Presentase Museum yang dikelola oleh Pemda (2 Museum)	100%	persentase		100	100	100,00		100	10000,00
2	22	05	2,01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya perlindungan,pengembangan, pemanfaatan Cagar Budaya yang telah di tetapkan	20	cagar budaya		8	8	100,00	12	20	100,00
2	22	05	2,01	02	Penetapan Cagar Budaya	Terlestarikannya cagar budaya	9	Kawasan	8	8	8	100,00	8	24	266,67
2	22	05	2,02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelestarian Cagar Budaya yang sudah ditetapkan	20	cagar budaya		8	8	100,00	12	20	100,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Ralisasi Capaian Taerget Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
										Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatn s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	22	05	2,02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya di lindungi yang sudah ditetapkan	20	buah	8	8	8	100,00	12	28	140,00
2	22	05	2,02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Cagar budaya yang dil kembangkan	32	buah				-		-	0,00
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase musuem yang dikelola	78,67 %	persentase						-	0,00
2	22	06	2,01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan koleksi museum	2	museum		2	2	100,00	2	4	200,00
2	22	06	2,01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia	8	Titik				-		-	0,00
2	22	06	2,01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah museum yang di revitalisasi	8	Bangunan / Gedung				-		-	0,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran umum capaian indikator kinerja kunci sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang Pendidikan dan Kebudayaan adalah

Berdasarkan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah terdapat dua urusan, yaitu urusan pendidikan dan urusan kebudayaan.

Indikator Kinerja Utama urusan pendidikan dan kebudayaan meliputi:

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah target 69,00 nilai capaian 70,00 nilai.
2. Rata-rata lama sekolah target 9,24 Tahun capaian 9,25 Tahun
3. Harapan Lama Sekolah target 13,61 Tahun capaian 13,64 Tahun
4. Indeks Kebudayaan target 90% Prosentase capaian 53.23 prosentase

No	Jenis Pelayanan Dasar Penerima Pelayanan Dasar Mutu Pelayanan Dasar	Jenis Pelayanan Dasar Penerima Pelayanan Dasar Mutu Pelayanan Dasar	Prosentase jumlah anak yang sudah tamat atau sedang belajar
1	Pendidikan anak usia dini	Warga negara usia 5 s.d. 6 tahun.	$PAUD = \frac{18.297}{29.356}\ x\ 100\%$ = 62,33%
2	Pendidikan dasar	Warga negara usia 7 s.d. 15 tahun.	$SD = \frac{92.846}{94.357}\ x\ 100\%$ = 98,40% $SMP = \frac{39.734}{44.038}\ x\ 100\%$ = 90,23%
3	Pendidikan kesetaraan	Warga negara usia 7 s.d. 18 tahun.	$Kesetaraan = \frac{135.843}{172.990}\ x\ 100\%$ = 78,53%

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Target realisasi
		Indikator	Skor Max	
1	PAUD	1) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan	100%	91.95%
		2) Standar Isi	100%	92.99%
		3) Standar Proses	100%	98.75%
		4) Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	100%	66.35%
		5) Standar Sarana & Prasarana	100%	79.12%
		6) Standar Pengelolaan	100%	94.37%
		7) Standar Pembiayaan	100%	86.25%
		8) Standar Penilaian Pendidikan	100%	89.59%
2	SD	1) Standar kompetensi lulusan	100%	95.35%
		2) Standar isi	100%	90.77%
		3) Standar proses	100%	96.21%
		4) Standar sarana dan prasarana	100%	88.06%
		5) Standar pengelolaan	100%	98.78%
		6) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	79.35%
		7) Standar pembiayaan	100%	70.35%
		8) Standar penilaian	100%	88.20%
3	SMP	1) Standar kompetensi lulusan	100%	92.35%
		2) Standar isi	100%	91.21%
		3) Standar proses	100%	94.49%
		4) Standar sarana dan prasarana	100%	87.78%
		5) Standar pengelolaan	100%	98.63%
		6) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	81.35%
		7) Standar pembiayaan	100%	89.64%
		8) Standar penilaian	100%	88.78%
4	Pendidikan Kesetaraan	1) Standar kompetensi lulusan	100%	70.96%
		2) Standar isi	100%	74.65%
		3) Standar proses	100%	76.01%
		4) Standar sarana dan prasarana	100%	70.04%
		5) Standar pengelolaan		70.44%
		6) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	68.80%
		7) Standar pembiayaan	100%	72.12%
		8) Standar penilaian	100%	70.07%

Rincian capaian indikator IKU, IKK dan SPM sebagai hasil penyelenggaraan urusan pendidikan dan kebudayaan secara ringkas dapat dilihat pada Tabel T-C.30.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		IKU	67	69	71	71	69,1	70	72	74	
2	Rata-rata lama sekolah		IKU	9,23	9,24	9,25	9,25	9,24	9,25	9,25	9,26	
3	Harapan Lama Sekolah		IKU	13,6	13,61	13,62	13,62	13,63	13,64	13,63	13,64	
4	Angka Partisipasi Kasar PAUD			79,31%	79,32%	79,33%	79,33%	79,31%	80,31%	79,33%	81,89%	
5	Angka Partisipasi Kasar SD			102%	101,09%	100,31%	100,31%	107%	105,13%	100,00%	100,00%	
6	Angka Partisipasi Murni SD			97,13%	97,25%	97,37%	97,37%	97,27%	98,27%	97,37%	99,37%	
7	Angka Partisipasi Sekolah SD			100,90%	100,85%	100,81%	100,81%	99,83%	99,88%	100,81%	100,00%	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	Angka Putus Sekolah SD			465	398	278	278	652	278	278	0	
9	Angka Partisipasi Kasar SMP			100,76%	100,55%	100,34%	100,34%	105,95%	107,95%	100,34%	100,00%	
10	Angka Partisipasi Murni SMP			77,91%	78,03%	78,15%	78,15%	79,15%	80,15%	79,25%	78,15%	
11	Angka Partisipasi Sekolah SMP			100%	100,20%	100,19%	100,19%	98,73%	98,93%	100,19%	100,00%	
12	Angka Putus Sekolah SMP			418	338	258	258	498	258	258	0	
13	Angka Melek Huruf			99,95	0,9996	99,97%	99,97%	99,95%	99,96%	99,97	99,97	
14	Indeks Kebudayaan		IKU	88,00%	90%	91,00%	91%	49,08%	53,23%	91	95	
15	Cakupan warisan budaya yang dilestarikan			88,00%	90%	91,00%	91%	88,00%	89%	91	95	
16	Indeks Pendidikan Mutu Pendidikan			82,02%	84,48%	83,45%	83,45%	82,74%	84,74%	83,45%	86,23%	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Prosentase jumlah anak berdasarkan umur yang sudah tamat atau sedang belajar pada jenjang/jenis Pendidikan											
17	Pendidikan anak usia dini	SPM		94,34	94,84	95,34	95,84	62,00	62,33%	95,34	96,89	
18	Pendidikan dasar	SPM		100	100	100	100	90,00	90,23%	100	100	
19	Pendidikan kesetaraan	SPM		50,5	58,5	63	63	78,53%	78,53%	91	92,9	
20	Kemampuan Literasi SD	SPM			56,12				57,30		62,29	Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 Tanggal 16 Februari 2024
21	Kemampuan Literasi SMP	SPM			68,94				70,08		76,68	
22	Kemampuan Numerasi SD	SPM			41,94				43,86		46,39	
23	Kemampuan Numerasi SMP	SPM			68,29				62,61		71,47	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
24	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	SPM			100				60,51		100	
25	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	SPM			100				99,69		100	
26	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	SPM			100				18,10		100	
27	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	SPM			48,40				47,37		48,43	
28	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	SPM			73,90				73,06		75,16	
29	Iklim Inklusivitas SD	SPM			58,71				53,59		63,01	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
30	Iklim Inklusivitas SMP	SPM			58,51				56,46		64,41	
31	Iklim Keamanan SD	SPM			72,93				70,87		78,44	
32	Iklim Keamanan SMP	SPM			70,53				69,72		75,81	
33	Iklim Kebinekaan SD	SPM			70,99				70,80		79,34	
34	Iklim Kebinekaan SMP	SPM			68,80				73,12		77,89	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

a. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

1) Keberadaan Lembaga PAUD (Formal dan Non Formal) belum merata di pelosok desa di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara;

2) Belum maksimalnya akreditasi lembaga pendidikan anak usia dini, termasuk peningkatan mutu PAUD maupun kesejahteraan guru PAUD;

3) Masih banyak pendidik PAUD yang belum berkualifikasi S1/D-IV;

4) Tingkat kesadaran masyarakat yang kurang terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini, karena masyarakat masih menganggap bahwa pendidikan PAUD itu tidak penting, baik melalui TK/RA/BA maupun Kelompok Bermain dan Tempat Penitipan Anak/sejenisnya, sehingga masyarakat lebih condong untuk memasukan anaknya langsung ke Sekolah Dasar sekalipun usianya masih belum cukup.

5) Pengadaan Peralatan untuk Pengelolaan Dana BOP/BOS.

6) Transformasi digital dalam bidang pendidikan.

7) Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar.

b. Layanan Pendidikan Dasar

1) Masih terdapat Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sekolah sesuai standar pelayanan minimal (SPM);

2) Masih terdapat guru SD dan SMP yang belum layak mengajar karena belum berkualifikasi kurang dari S1/D-IV;

3) Masih terdapat guru SD dan SMP yang kualifikasi S1/D4 tidak linear dengan mata pelajaran yang diampunya;

4) Masih terdapat kekurangan jumlah guru PNS SD mata pelajaran Agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha dan Guru PNS SD mata pelajaran Pendidikan Jasmani;

5) Banyaknya jabatan kepala sekolah pada satuan pendidikan SD yang belum definitif dikarenakan belum terpenuhinya syarat calon kepala sekolah.
6) Masih terdapat siswa yang mengulang kelas dan putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar;
7) Masih banyak sekolah dasar yang kekurangan ruang kelas dan belum memiliki perpustakaan, ruang kepala sekolah/ guru dan TU, ruang UKS;
8) Masih terdapat SMP yang belum memiliki Lab Komputer dan Lab Bahasa serta belum meratanya tenaga pustakawan dan laboran untuk menunjang kualitas pembelajaran;
9) Kebijakan tidak ada pungutan sekolah pada jenjang pendidikan dasar menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk mendukung dan menjamin kepastian masyarakat mendapatkan pendidikan yang bebas pungutan dan berkualitas.
10) Masih banyak sekolah SMP yang belum memiliki guru mata pelajaran.
11) Pengadaan Peralatan untuk Pengelolaan Dana BOP/BOS.
12) Transformasi digital dalam bidang pendidikan.
13) Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar.

c. Layanan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
1) Apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan non formal masih kurang;
2) Kurangnya pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan non formal;
3) Belum terpenuhinya standar sarana prasarana pendidikan non formal;
4) Masih banyak penduduk usia produktif yang belum mempunyai ketrampilan dan kemandirian;
5) Belum adanya pemetaan terhadap masyarakat yang membutuhkan pendidikan non formal.

d. Layanan Pendidikan Masyarakat dan Kecakapan Hidup
   1) Apresiasi masyarakat terhadap pendidikan masyarakat masih kurang;
   2) Kurangnya lembaga pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keterampilan dan pelatihan;
   3) Belum optimalnya akses UPT Sanggar Kegiatan Belajar bagi masyarakat;
   4) Kurangnya bantuan sarana prasarana untuk peningkatan mutu pendidikan masyarakat;
   5) Daya serap pendidikan masyarakat terhadap kebutuhan pasar masih kurang;
   6) Hasil lulusan pendidikan masyarakat belum sepenuhnya mampu menekan angka pengangguran masyarakat pada usia produktif;
   7) Belum optimalnya layanan pendidikan orang dewasa dan pendidikan kecakapan hidup.

e. Layanan Birokrasi Internal dan Manajemen Pendidikan
   1) Belum adanya standar operasional prosedur, standar minimal pendidikan daerah, maupun kode etik profesional kinerja yang mendukung pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
   2) Belum optimalnya akses teknologi informasi dan penerapan ICT untuk pengelolaan pendidikan dan mendukung realisasi manajemen pendidikan yang transparan dan akuntabel;
   3) Belum optimalnya tata kelola pendidikan termasuk belum adanya ISO 9001: 2000 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara;
   4) Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan internal dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan;
   5) Ketimpangan kualifikasi sumber daya manusia aparatur yang ada dengan tuntuan pekerjaan yang semakin kompleks.

f. Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan
   1) Belum semuanya satuan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan terakreditasi minimal Baik (B);
   2) Belum adanya sekolah dasar unggulan disetiap kecamatan;
   3) Belum terpenuhinya standar nasional pendidikan;
   4) Belum optimalnya penerapan dan pengembangan kurikulum satuan pendidikan;
   5) Belum adanya pemetaaan dan penataan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

g. Layanan Pelestarian Kebudayaan
   1) Indeks Kebudayaan belum mencapai angka 88%, yaitu baru 49,08%;
   2) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi;
   3) Banyaknya Situs cagar kebudayaan yang belum dilakukan penetapan;
   4) Masih Rendahnya Pelestarian kesenian daerah.

2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Dengan dilaksanakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara secara langsung untuk periode tahun 2021-2026, maka dalam merencanakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari arah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan berkomitmen mengawal arah kebijakan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih.

Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih adalah: “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

Sedangkan misi yang telah ditetapkan adalah:

1) Memanfaatkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani;
2) Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya;
3) Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif;
4) Meningkatkan kualitas layanan struktur dasar dan konektivitas antar wilayah;
5) Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan.

Dalam implementasi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, terdapat 2 misi yang menjadi tugas dan tanggung jawab OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu:

1) Memantapkan birokrasi yang bersih, efektif dan melayani yang tertuang dalam Program Kukar Bebaya
2) Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya, yang tertuang dalam Program :
    a) Program 1000 guru sarjana

       Program 1000 guru sarjana Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan Beasiswa Guru yang belum mencapai pendidikan standard S1 ditambah dengan Beasiswa Bagi Calon Guru yang berasal dari penduduk Lokal Yang Bersedia Menjadi Guru, yang dilaksanakan secara bertahap dengan target minimal 1.000 Guru, selama periode kepemimpinan.
    b) Program Beasiswa Kukar Idaman

       Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk mengapresiasi prestasi, minat dan bakat SISWA/SISWI/dan MAHASISWA/ MAHASISWI Kukar untuk melanjutkan sekolah/kuliah (sekolah/perguruan tinggi umum maupun keagamaan) dengan perikatan dalam skema tematik sesuai kebutuhan pembangunan daerah(regular dan

stimulant), dengan target 1.000 orang di Perguruan Tinggi Skema Tematik, 100 Santri Lanjut Perguruan Tinggi, 4.000 orang bantuan Stimulan Mahasiswa Kutai Kartanegara, 1.000 Orang beasiswa di Pasantren, dan 3.000 orang bantuan stimulan siswa/siswiSD/SMP Kutai Kartanegara selama periode kepemimpinan.

c) Program Gerakan Etam Mengaji Idaman (GEMA Idaman)

Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam proses pembangunan manusia yang unggul, produktif dan modern yang tidak meninggalkan nilai-nilai Ketuhanan,yang siap bersaing di pentas dunia global, dengan rangkaian strategy memperkuat lembaga-lembaga keagamaan, penyediaan pusat kegiatan keagamaan yang representatif, dan mewajibkan sekolah untuk memasukkan tambahan pelajaran mengaji bagi siswa Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama, serta merehabilitasi rumah ibadah minimal 50 rumah ibadah pertahun

d) Program Kukar Berbudaya

Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk membangun pusat-pusat pelestarian dan pengembangan budaya Kutai Kartanegara, dengan menetapkan Tenggarong sebagai Kota Warisan Budaya, dengan menonjolkan kesan Tenggarong Sebagai Kota Sejarah dan Budaya yang Ramah dan Modern.

3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Kalimantan Timur

1) Rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun

2020-2024. Sejalan Rencana dengan itu, Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:

a) Beriman, Bertakwa Kepada Tuhan YME dan Berakhlak Mulia;
b) Mandiri;
c) Bernalar Kritis;
d) Berkebhinekaan Global;
e) Gotong Royong;
f) Kreatif

Keenam ciri tersebut dijabarkan sebagai berikut:

(1) Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia

Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama; (b) akhlak pribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan (e) akhlak bernegara.

(2) Mandiri

Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.

(3) Bernalar kritis

Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran,

merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan

(4) Berkebinekaan global

Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan.

(5) Bergotong royong

Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong-royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.

(6) Kreatif

Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.

2) Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur merumuskan Rencana Strategis pembangunan pendidikan tahun 2019-2023 yang mengusung visi: Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Timur yang Cerdas, Berkualitas dan Punya Daya Saing.

Sedangkan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur adalah:

a) Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat.
b) Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
c) Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu.
d) Mewujudkan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan, serta Pengembangan Bahasa.
e) Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

4. Penentuan Isu-Isu strategis

Penentuan Isu, Asumsi dan Prioritas Strategis Berdasarkan identifikasi permasalahan, telahaan visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara terpilih serta telaahan terhadap rencana strategis pembangunan pendidikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, maka dapat ditentukan isu, asumsi dan prioritas strategis yang dapat dijadikan fokus pembangunan pendidikan lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1) Isu Strategis
    a) Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa, karena masih banyak anak usia 0-6 tahun yang belum terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini;
    b) Penyelenggaraan Pendidikan Dasar belum dapat diselenggarakan secara optimal karena belum ada kepastian dan jaminan bagi peserta didik dalam mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan;
    c) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan termasuk penyelenggaraan pendidikan non formal yang setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan kontribusi

terhadap peningkatan produktifitas sumber daya manusia yang terampil dan potensial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

d) Hasil belajar peserta didik dan presentase siswa lulus ujian nasional maupun rata-rata nilai ujian nasional masih di bawah rata-rata provinsi / nasional;

e) Masih rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan termasuk masih banyaknya pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar kompetensi dan standar pelayanan minimal pendidikan serta prestasi pendidik dan tenaga kependidikan yang masih belum optimal;

f) Belum terintegrasinya penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang mencakup kecakapan personal, sosial dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur;

g) Penyelenggaraan sistem tata kelola, tata nilai sumber daya aparatur dan layanan birokrasi internal manajemen pendidikan yang belum optimal dalam melaksanakan layanan prima pendidikan termasuk belum efektifnya pengawasan dalam pelaksanaan anggaran dan bantuan pendidikan.

h) Belum adanya wadah pengembangan seni budaya bahasa dan sastra daerah.

i) Pelestarian sejarah dan warisan budaya yang saat ini sudah termaktub dalam road map dan tahap penyempurnaan

j) Belum adanya pusat kebudayaan masyarakat melayu kutai

k) Belum optimalnya penulisan sejarah lokal

l) Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian benda cagar budaya.

m) Masih belum teranggarkan gaji P3K untuk Guru sebanyak 938 Orang sebesar Rp.. 54.214.292.596.

n) Terdapat 57 paket pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar Rp.70.442.668.202,-

o) Transformasi digital dalam bidang pendidikan merupakan proses pemanfaatan teknologi untuk membawa perubahan dengan tujuan meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran, memudahkan aksesibilitas, serta membantu siswa mempersiapkan diri dalam dunia yang semakin terkoneksi secara digital.

2) Asumsi dan Prioritas Strategis

Asumsi dan Prioritas strategis merupakan hasil simpulan dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan dan kebudayaan yang dianalisa berdasarkan analisa SWOT yang dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan pendidikan. Beberapa asumsi dan prioritas strategis yang dapat disimpulkan dalam rencana strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

a) Peningkatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa;

b) Peningkatan layanan kepastian dan jaminan Pendidikan Dasar yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara;

c) Perluasan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus disetiap sekolah dengan memaksimalkan peran kelas inklusi;

d) Peningkatan layanan Pendidikan Masyarakat yang berkelanjutan, setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat termasuk peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal;

e) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan meningkatnya prosentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi dan standar pelayanan minimal pendidikan serta prestasi pendidik dan tenaga kependidikan;

f) Peningkatan layanan pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang mencakup kecakapan personal, sosial dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur;

g) Peningkatan penyelenggaraan sistem tata kelola dan tata nilai sumber daya aparatur dalam melaksanakan pendidikan.

h) Penyediaan wadah dan pusat kebudayaan masyarakat Melayu Kutai.

i) Penyelenggaraan even-even kesenian daerah dari tingkat lokal sampai nasional.

j) Pembinaan dan pelestarian sejarah lokal.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 maka dapat dijelaskan bahwa RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Selanjutnya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025. Adapun dalam penyusunannya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang terkait seperti RPJM Nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RPJMD dan RKP Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkankan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah terciptanya sinkronisasi dan integrasi Program/Kegiatan Pembangunan antara Pemerintah Pusat

dan Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana menyebutkan bahwa program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang di rencanakan. Memperhatikan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi serta berdasarkan identifikasi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan perkiraan kondisi tahun 2022 serta prospek tahun 2023 maka prioritas dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 di tetapkan sebagai berikut:

TABEL T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69	Nilai	692.860.654.640	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71 Nilai	1.241.176.043.127	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	8	Dokumen	750.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	8 Dokumen	1.000.000.000	
							PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
							PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	250.000.000	
							PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	350.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	450.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1	Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan	Kabupaten Kutai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	-	

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Dokumen RKA SKPD		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Dokumen RKA-SKPD	Kartanegara	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Dokumen	200.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50.000.000	

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	150.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	150.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	###	1. Dokumen 2. Orang/ Bulan	583.544.176.276	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	71894 Dokumen	1.131.634.564.763	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71892	Orang/ bulan	582.944.176.276	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71992 Orang/ bulan	1.131.159.564.763	Target Bertambah, pagu anggaran bertambah
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	Laporan	150.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	250.000.000	

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	450.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	200.000.000	
							Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya Inventarisasi Aset Perangkat Daerah	964	Dokumen	300.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya Inventarisasi Aset Perangkat Daerah	964 Dokumen	275.000.000	
							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000	
							Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi	0 Laporan	50.000.000	

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
									Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			
	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10	Laporan	100.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	100.000.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	200.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pegawai PNS dan Non PNS Perangkat Daerah	771	orang	750.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pegawai PNS dan Non PNS Perangkat Daerah	771 Orang	750.000.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	560	Dokumen	150.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	560 Dokumen	150.000.000	

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi danPenilaian Kinerja Pegawai	70	Dokumen	200.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	70 Dokumen	200.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	43	Orang	150.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	43 Orang	150.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	98	Orang	250.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	98 Orang	250.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	###	Buah	1.665.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	23708 Orang/ Bulan	1.665.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	450.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	450.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	300.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	300.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	75.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	75.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1440	Dokumen	90.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1440 Dokumen	90.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30	Laporan	100.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	100.000.000	

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21	Laporan	400.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	400.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	Dokumen	200.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	200.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	30	unit	390.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	30 Unit	390.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	30	Unit	390.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	390.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	###	Bulan/ Orang	104.736.478.364	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	6335 Buah	104.736.478.364	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air	4	Laporan	1.250.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Kutai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	4 Laporan	1.250.000.000	

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			dan Listrik yang Disediakan					Kartanegara	dan Listrik yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan	100.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	Laporan	103.386.478.364	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	23 Laporan	103.386.478.364	Penambahan dikarenakan adanya terbit nuptk baru non pns
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya sarana Prasarana yang dilakukan pemeliharaan	528	Unit	725.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya sarana Prasarana yang dilakukan pemeliharaan	528 Unit	725.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	Unit	125.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	125.000.000	

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	atau Kendaraan Dinas Jabatan											
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	480	Unit	75.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	480 Unit	75.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	Unit	200.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	200.000.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	25.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	25.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	300.000.000	

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD (Angka Indeks Max 7)	88	Presentase	331.232.036.900	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD (Angka Indeks Max 7)	88,43	237.016.011.200	
			Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP (Angka Indeks Max 7)	87	Presentase				Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP (Angka Indeks Max 7)	87,43		
			Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Paud (Angka Indeks Max 7)	82	Presentase				Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Paud (Angka Indeks Max 7)	82,02		
			Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetraan (Angka Indeks Max 7)	67	Presentase				Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetraan (Angka Indeks Max 7)	67,38		
			Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar IDAMAN Pendidikan Dasar	###	orang				Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar IDAMAN Pendidikan Dasar	3000		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Standar kompetensi lulusan Pendidikan Sekolah Dasar	###	Presentase	173.684.726.140	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Standar kompetensi lulusan Pendidikan Sekolah Dasar	91,79%	107.543.807.000	
			Standar isi Pendidikan Sekolah Dasar	###	Presentase				Standar isi Pendidikan Sekolah Dasar	87,50%		

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Standar proses Pendidikan Sekolah Dasar	###	Present ase				Standar proses Pendidikan Sekolah Dasar	94,08%		
			Standar sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Dasar	###	Present ase				Standar sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Dasar	84,50%		
			Standar pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	###	Present ase				Standar pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	97,08%		
			Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	###	Present ase				Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	75,08%		
			Standar pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar	###	Present ase				Standar pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar	87,93%		
			Standar penilaian Pendiidkan Sekolah Dasar	###	Present ase				Standar penilaian Pendiidkan Sekolah Dasar	84,93%		
							Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	900 Dokumen	700.000.000	

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
							Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	300.000.000	
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	62	Ruang	21.700.000.000	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	76 Ruang	-	Target berkurang, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian Standarisasi Harga Satuan Barang Meningkat (Meningkatkan APM dan Menurunkan APS SD)
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kabupaten Kutai Kartanegara SDN 029 Samboja SDN 016 Tenggarong SDN 010 Loa Janan SDN 023 Tenggarong	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	20	Ruang	5.300.000.000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	1.500.000.000	Target berkurang, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian Standarisasi Harga Satuan Barang Meningkat

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Seberang SDN 010 Muara Wis										
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kabupaten Kutai Kartanegara (SDN 016 Tenggarong SDN 002 Samboja)	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	18	Ruang	5.040.000.000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	400.000.000	Target Bertambah, pagu anggaran sama disebabkan penyesuaian Standarisasi Harga Satuan Barang (Meningkatkan SPM dan Standar Sarana Prasarana Pendidikan)
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kabupaten Kutai Kartanegara (SDN 008 Kota Bangun SDN 003 Muara Wis SDN 007 Kembang Janggut SDN 024 Tenggarong SDN 014 Sebulu SDN 008 Sebulu	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10	Ruang	2.685.000.000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	7 Ruang	2.685.000.000	Target Bertambah, pagu anggaran bertambah (Meningkatkan SPM dan Standar Sarana Prasarana Pendidikan)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		SDN 022 Marangkayu SDN 017 Marang Kayu SDN 029 Samboja SDN 028 Loa Janan)										
	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kabupaten Kutai Kartanegara (SDN 032 Loa Kulu SDN 003 Samboja SDN 010 Muara Jawa SDN 007 Kembang Janggut SDN 026 loa Kulu)	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	63	Unit	14.175.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	22 Unit	5.795.000.000	Target Bertambah, pagu anggaran bertambah (Meningkatkan SPM dan Standar Sarana Prasarana Pendidikan)
							Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	300.000.000	
							Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,	6 Unit	3.000.000.000	

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
							Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat			
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kabupaten Kutai Kartanegara (SDN 026 Tenggarong SDN 024 Samboja SDN 026 Muara Kaman SDN 012 Tabang SDN 016 Loa Kulu)	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	45	Ruang	14.400.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	341 Ruang	-	Target Bertambah, pagu anggaran bertambah (Meningkatkan SPM dan Standar Sarana Prasarana Pendidikan)
	Pengadaan Mebel Sekolah	Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Tabang Kecamatan MarangkayuKecamatan Samboja Kecamatan Tenggarong	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	27	Paket	64.174.526.140	Pengadaan Mebel Sekolah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1500 Paket	2.550.000.000	Target Bertambah, pagu anggaran bertambah (Meningkatkan SPM dan Standar Sarana Prasarana Pendidikan)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Seberang Kecamatan Muara Jawa)										
							Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	5.260.000.000	Sub Kegiatan Baru Meningkatkan SPM dan Standar Sarana Prasarana Pendidikan)
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2000	Peserta Didik	950.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2000 Peserta Didik	950.000.000	
							Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1139 Paket	10.493.607.000	Sub kegiatan baru untuk Pemenuhan Sarana Pelaksanaan Assement Nasional
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	472	Satuan Pendidikan	950.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	2406 Satuan Pendidikan		Target bertambah, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian Standarisasi Harga Satuan Barang Meningkat

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
												(Meningkatkan SPM dan Standar Isi)
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	439	Satuan Pendidikan	150.000.000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	439 Satuan Pendidikan	-	
	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	514	Peserta Didik	750.000.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	489 Peserta Didik	750.000.000	Target bertambah, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian Standarisasi Harga Satuan Barang Meningkat (Meningkatkan SPM dan Standar Isi)
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yangTersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	160	Orang	240.000.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	160 Orang	240.000.000	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	330	Orang	2.255.000.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	Kabupaten Kutai	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	480 Orang	3.455.000.000	Target Bertambah, pagu anggaran bertambah (Meningkatkan SPM

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kartanegara	Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			dan Standar Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan)
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	70	Satuan Pendidikan	250.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	70 Satuan Pendidikan	250.000.000	Target Bertambah, pagu anggaran bertambah (Meningkatkan SPM dan Standar Mutu Kelembagaan Sekolah)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	472	Satuan Pendidikan	40.115.200.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	94342 Satuan Pendidikan	68.365.200.000	Target Bertambah, pagu anggaran bertambah (Meningkatkan SPM dan Standar Mutu Pembiayaan Sekolah)
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1416	Orang	550.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	944 Orang	550.000.000	Target Bertambah, pagu anggaran bertambah (Meningkatkan SPM dan Standar Mutu Pembiayaan Sekolah)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
							Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1 Ruang	-	Sub kegiatan baru untuk Pemenuhan Prasarana Pelaksanaan Assement Nasional
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Standar kompetensi lulusan Pendidikan SMP	###	persentase	114.264.669.300	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Standar kompetensi lulusan Pendidikan SMP	89,22%	84.044.907.200	
			Standar isi Pendidikan SMP	###	persentase				Standar isi Pendidikan SMP	84,79%		
			Standar proses Pendidikan SMP	###	persentase				Standar proses Pendidikan SMP	91,79%		
			Standar sarana dan prasarana Pendidikan SMP	###	persentase				Standar sarana dan prasarana Pendidikan SMP	79,65%		
			Standar pengelolaan Pendidikan SMP	###	persentase				Standar pengelolaan Pendidikan SMP	92,36%		
			Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	###	persentase				Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	75,65%		
			Standar pembiayaan Pendidikan SMP	###	persentase				Standar pembiayaan Pendidikan SMP	86,22%		
			Standar penilaian Pendidikan SMP	###	persentase				Standar penilaian Pendidikan SMP	80,36%		

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
							Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit		Target bertambah, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian Standarisasi Harga Satuan Barang Meningkat (Meningkatkan APM dan Menurunkan APS SMP)
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kabupaten Kutai Kartanegara (Mts Al Hidayah 4 Lokal)	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	26	Ruang	9.100.000.000	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	81 Ruang		Target bertambah, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian Standarisasi Harga Satuan Barang Meningkat (Meningkatkan APM dan Menurunkan APS SMP)
							Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	750.000.000	Sub Kegiatan Baru untuk Pemenuhan Prasarana sekolah dalam peningkatan pelayanan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kabupaten Kutai Kartanegara (SMPN 9 Tenggarong)	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10	Ruang	3.750.000.000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	300.000.000	Target bertambah, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian Standarisasi Harga Satuan Barang Meningkat (Meningkatkan SPM dan Standar Sarana Prasarana Pendidikan)
							Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	12 Ruang		Target bertambah, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian Standarisasi Harga Satuan Barang Meningkat (Meningkatkan SPM dan Standar Sarana Prasarana Pendidikan)
	Pembangunan Laboratorium	Kabupaten Kutai Kartanegara (SMPN 8 Muara Badak 1 Ruang SMPN 9	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	10	Ruang	3.500.000.000	Pembangunan Laboratorium	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	700.000.000	Target bertambah, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian Standarisasi Harga Satuan Barang Meningkat

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Tenggarong 1 Ruang)										(Meningkatkan SPM dan Standar Sarana Prasarana Pendidikan)
							Pembangunan Asrama Sekolah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		Sub Kegiatan Baru untuk Pemenuhan Prasarana sekolah dalam peningkatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
							Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit		Sub Kegiatan Baru untuk Pemenuhan Prasarana sekolah dalam peningkatan pelayanan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kabupaten Kutai Kartanegara (	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	12	Unit	7.834.769.300	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	4.542.307.200	Target bertambah, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian Standarisasi Harga Satuan Barang Meningkat (Meningkatkan SPM dan Standar Sarana Prasarana Pendidikan)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
							Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang		Sub Kegiatan Baru untuk Pemenuhan Prasarana sekolah dalam peningkatan pelayanan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
	Pengadaan Mebel Sekolah	Kabupaten Kutai Kartanegara (SMPN 9 TenggarongSMPN 8 Muara BadakSMPN 1 Loa Kulu SMPN 3 Anggana SMPN 1 Tenggarong Seberang SMPN 8 Loa Kulu SMPN 7 Tenggarong SMPN 2 Sebulu SMPN 6 Tenggarong Seberang	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	23	Paket	57.237.300.000	Pengadaan Mebel Sekolah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	21 Paket	1.910.000.000	Target Berkurang, Pagu Anggaran Berkurang.

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		SMPN 9 Kota Bangun)										
							Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	16 Paket	2.200.000.000	Sub Kegiatan Baru untuk Pemenuhan Sarana Sekolah dalam peningkatan pelayanan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1015	Peserta Didik	960.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1015 Peserta Didik	960.000.000	
							Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	17 Paket	42.200.000.000	Sub Kegiatan Baru untuk Pemenuhan Sarana Sekolah dalam peningkatan pelayanan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	9700	Peserta Didik	1.275.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	96714 Peserta Didik		Target bertambah, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian Standarisasi Harga

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
												Satuan Barang Meningkat (Meningkatkan SPM dan Standar Isi)
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	15	Satuan Pendidikan	150.000.000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	160 Satuan Pendidikan		Target bertambah, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian Standarisasi Harga Satuan Barang Meningkat (Meningkatkan SPM dan Standar Isi)
	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1220	Peserta Didik	1.000.000.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	869 Peserta Didik	1.025.000.000	Target sama, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian Standarisasi Harga Satuan Barang Meningkat (Meningkatkan SPM dan Standar Proses)
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi	325	Orang	2.470.000.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan	325 Orang	2.470.000.000	Target berkurang, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian Standarisasi Harga

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Sekolah Menengah Pertama		Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				Sekolah Menengah Pertama		Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			Satuan Barang Meningkat (Meningkatkan SPM dan Standar Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan)
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	102	Satuan Pendidikan	150.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	102 Satuan Pendidikan	150.000.000	Target bertambah, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian Standarisasi Harga Satuan Barang Meningkat (Meningkatkan SPM dan Standar Standar Pengelolaan)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	195	Satuan Pendidikan	26.537.600.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	41000 Satuan Pendidikan	26.537.600.000	Target Bertambah, pagu anggaran bertambah (Meningkatkan SPM dan Standar Mutu Pembiayaan Sekolah)
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana	585	Orang	300.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana	Kabupaten Kutai	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana	390 Orang	300.000.000	Target sama, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	BOS Sekolah Menengah Pertama		BOS Sekolah Menengah Pertama				BOS Sekolah Menengah Pertama	Kartanegara	BOS Sekolah Menengah Pertama			Standarisasi Harga Satuan Barang Meningkat (Meningkatkan SPM dan Standar Mutu Pembiayaan Sekolah)
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan PAUD	###	Persentase	34.318.750.000	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan PAUD	88,68%	26.130.897.000	
			Standar Isi Pendidikan PAUD	###	Persentase				Standar Isi Pendidikan PAUD	90,43%		
			Standar Proses Pendidikan PAUD	###	Persentase				Standar Proses Pendidikan PAUD	97,34%		
			Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	###	Persentase				Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	42,69%		
			Standar Sarana Prasana Pendidikan PAUD	###	Persentase				Standar Sarana Prasana Pendidikan PAUD	72,83%		
			Standar Pengelolaan Pendidikan PAUD	###	Persentase				Standar Pengelolaan Pendidikan PAUD	91,70%		
			Standar Pembiayaan Pendidikan PAUD	###	Persentase				Standar Pembiayaan Pendidikan PAUD	82,40%		
			Standar Penilaian Pendidikan PAUD	###	Persentase				Standar Penilaian Pendidikan PAUD	86,00%		

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
							Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	250.000.000	
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	7	Unit	2.600.000.000	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	112 Unit		Target bertambah, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian Standarisasi Harga Satuan Barang Meningkat (Meningkatkan APK dan Menurunkan APS PAUD)
	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10	Unit	2.475.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10 Unit	2.000.000.000	Target bertambah, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian Standarisasi Harga Satuan Barang Meningkat (Meningkatkan SPM dan Standar Sarana Prasarana Pendidikan)
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah	4	Unit	2.310.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang	Kabupaten Kutai	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah	3 Unit	685.257.000	Target bertambah, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Kelas/Ruang Guru PAUD		Direhabilitasi Sedang/Berat				Kelas/Ruang Guru PAUD	Kartanegara	Direhabilitasi Sedang/Berat			Standarisasi Harga Satuan Barang Meningkat (Meningkatkan SPM dan Standar Sarana Prasarana Pendidikan)
							Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	946.460.000	
	Pengadaan Mebel PAUD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	96	Paket	15.320.000.000	Pengadaan Mebel PAUD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1540 Paket	2.990.500.000	Target Bertambah, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian Standarisasi Harga Satuan Barang Meningkat (Meningkatkan SPM dan Standar Sarana Prasarana Pendidikan)
	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	30	Paket	400.000.000	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	31 Paket		Target bertambah, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian Standarisasi Harga Satuan Barang

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
												Meningkat (Meningkatkan SPM dan Standar Sarana Prasarana Pendidikan)
							Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	41 Paket	2.401.080.000	Sub Kegiatan Baru Meningkatkan SPM dan Standar Sarana Prasarana Pendidikan
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1374	Peserta Didik	1.450.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	4899 Peserta Didik	2.500.000.000	Target bertambah, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian Standarisasi Harga Satuan Barang Meningkat (Meningkatkan SPM dan Standar Isi)
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	15	Satuan Pendidikan	400.000.000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	894 Satuan Pendidikan		Target bertambah, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian Standarisasi Harga Satuan Barang Meningkat (Meningkatkan SPM dan Standar Isi)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	456	Orang	2.475.000.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	456 Orang	2.475.000.000	Target bertambah, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian Standarisasi Harga Satuan Barang Meningkat (Meningkatkan SPM dan Standar Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan)
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100	Satuan Pendidikan	200.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	912 Satuan Pendidikan	1.450.000.000	Target bertambah, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian Standarisasi Harga Satuan Barang Meningkat (Meningkatkan SPM dan Standar penilaian)
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	564	Satuan Pendidikan	6.438.750.000	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	598 Satuan Pendidikan	10.182.600.000	Target bertambah, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian Standarisasi Harga Satuan Barang

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
												Meningkat (Meningkatkan SPM dan Standar pembiayaan)
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1692	Orang	250.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	564 Orang	250.000.000	Target bertambah, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian Standarisasi Harga Satuan Barang Meningkat (Meningkatkan SPM dan Standar pembiayaan)
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Angka Melek Huruf	100	persentase	8.963.891.460	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Angka Melek Huruf	99,97	19.296.400.000	
			Standar Kompetensi Kelulusan Pendidikan Kesetaraan	###	persentase				Standar Kompetensi Kelulusan Pendidikan Kesetaraan	67,57%		
			Standar Isi Pendidikan Kesetaraan	###	persentase				Standar Isi Pendidikan Kesetaraan	71,47%		
			Standar Proses Pendidikan Kesetaraan	###	persentase				Standar Proses Pendidikan Kesetaraan	71,43%		

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan	###	persentase				Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan	64,38%		
			Standar Sarana Prasana Pendidikan Kesetaraan	###	persentase				Standar Sarana Prasana Pendidikan Kesetaraan	66,14%		
			Standar Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	###	persentase				Standar Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	66,43%		
			Standar Pembiayaan Pendidikan Kesetaraan	###	persentase				Standar Pembiayaan Pendidikan Kesetaraan	61,23%		
			Standar Penilaian Pendidikan Kesetaraan	###	persentase				Standar Penilaian Pendidikan Kesetaraan	66,28%		
							Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	75.000.000	
							Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	14065 Peserta Didik	7.760.000.000	

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
							Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	16 set Paket	500.000.000	
							PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PENDIDIKAN NON FORMAL		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	3 unit	675.000.000	
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	5	Unit	1.750.000.000	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	8 Unit		Target bertambah, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian Standarisasi Harga Satuan Barang Meningkat (Menurunkan Angka Melek Huruf dan Buta Aksara)
	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	3	Unit	675.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	12 Unit		Target bertambah, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian Standarisasi Harga Satuan Barang Meningkat

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
												(Meningkatkan Standar Sarana Prasarana)
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3	Unit	750.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit		
	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	16	Paket	500.000.000	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	32 Paket		Target bertambah, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian Standarisasi Harga Satuan Barang Meningkat (Meningkatkan Standar Sarana Prasarana)
	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	3	Paket	75.000.000	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	59 Paket		Target bertambah, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian Standarisasi Harga Satuan Barang Meningkat

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
												(Meningkatkan Standar Sarana Prasarana)
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200	Peserta Didik	240.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2150 Peserta Didik	2.150.000.000	Target bertambah, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian Standarisasi Harga Satuan Barang Meningkat (Meningkatkan Standar Pembiayaan)
							Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	17 Paket		Sub Kegiatan Baru Meningkatkan Standar Sarana SKB
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	#####	Peserta Didik	2.050.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	13280 Peserta Didik		Target bertambah, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian Standarisasi Harga Satuan Barang Meningkat (Meningkatkan Standar Proses)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	40	Satuan Pendidikan	550.000.000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	40 Satuan Pendidikan		
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100	Satuan Pendidikan	237.491.460	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	135 Satuan Pendidikan	400.000.000	
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	100	Satuan Pendidikan	1.936.400.000	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	11800 Satuan Pendidikan	7.536.400.000	Target bertambah, anggaran bertambah disebebakan Penyesuaian Standarisasi Harga Satuan Barang Meningkat (Meningkatkan SPM dan Standar pembiayaan)
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana	300	Orang	200.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP	Kabupaten Kutai	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana	54 Orang	200.000.000	

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Nonformal/Kesetaraan		BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan					Kartanegara	BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Presentase Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan Muatan Lokal (Mulok)	50 %	Presentase	650.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Presentase Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan Muatan Lokal (Mulok)	50%	450.000.000	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Tersedianya kurikulum Muatan Lokal bagi jenjang pendidikan SD	1	dokumen	650.000.000	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Tersedianya kurikulum Muatan Lokal bagi jenjang pendidikan SD	1	450.000.000	
			Tersedianya kurikulum Muatan Lokal bagi jenjang pendidikan SMP	1	dokumen				Tersedianya kurikulum Muatan Lokal bagi jenjang pendidikan SMP	1		
			Tersedianya perangkat pembelajaran kurikulum muatan lokal jenjang SD	1	dokumen				Tersedianya perangkat pembelajaran kurikulum muatan lokal jenjang SD	1		
			Tersedianya perangkat pembelajaran kurikulum muatan lokal jenjang SMP	1	dokumen				Tersedianya perangkat pembelajaran kurikulum muatan lokal jenjang SMP	1		

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2	Dokumen	300.000.000	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2 Dokumen	100.000.000	
	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	2000	Buku	100.000.000	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	2000 Buku	100.000.000	
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	30	Orang	250.000.000	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	30 Orang	250.000.000	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Presentase terpenuhinya jumlah guru	90 %	Persentase	-	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Presentase terpenuhinya jumlah guru	90%	440.000.000	
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan		Rasio Guru dengan Peserta didik PAUD	1 : 12	rasio	-	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan		Rasio Guru dengan Peserta didik PAUD	1 : 12	440.000.000	
			Rasio Guru dengan Peserta didik SD	1 : 20	rasio				Rasio Guru dengan Peserta didik SD	1 : 20		
			Rasio Guru dengan Peserta didik SMP	1 : 20	rasio				Rasio Guru dengan Peserta didik SMP	1 : 20		

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	4	Dokumen		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	4 Dokumen	40.000.000	
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	250	Laporan		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	250 Laporan	400.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN		Persentase Satuan pendidikan yang memiliki izin	###	Persentase	250.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN		Persentase Satuan pendidikan yang memiliki izin	100%	250.000.000	

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	PERIZINAN PENDIDIKAN		pendirian dan izin operasional				PERIZINAN PENDIDIKAN		pendirian dan izin operasional			
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Penerbitan izin pendirian dan operasional sekolah	64	dokumen	50.000.000	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Penerbitan izin pendirian dan operasional sekolah	64	50.000.000	
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	28	Dokumen	35.000.000	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	28 Dokumen	35.000.000	
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	30	Dokumen	15.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	30 Dokumen	15.000.000	
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan		Penerbitan izin pendirian dan operasional sekolah	100	dokumen	200.000.000	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan		Penerbitan izin pendirian dan operasional sekolah	100	200.000.000	

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	150	Dokumen	100.000.000	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	150 Dokumen	100.000.000	
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	150	Dokumen	100.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	150 Dokumen	100.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		Cakupan sekolah yang menggunakan bahasa daerah sebagai mata pelajaran	50 %	Persentase	-	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		Cakupan sekolah yang menggunakan bahasa daerah sebagai mata pelajaran	50%	860.000.000	
	Pembinaan Pengembangan dan		Terlaksanannya program	160	sekolah	-	Pembinaan Pengembangan dan		Terlaksanannya program	160		

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		pembudayaan bahasa dan sastra daerah dijenjang sekolah SD				Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		pembudayaan bahasa dan sastra daerah dijenjang sekolah SD		860.000.000	
			Terlaksanannya program pembudayaan bahasa dan sastra daerah dijenjang sekolah SMP	60	sekolah				Terlaksanannya program pembudayaan bahasa dan sastra daerah dijenjang sekolah SMP	60		
			Jumlah penutur muda bahasa daerah	###	orang				Jumlah penutur muda bahasa daerah	2200		
			Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah	5	kali kegiatan				Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah	5		
	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	1000	Kamus		Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	1000 Kamus	100.000.000	
	Vitalitas Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya		Bahasa		Vitalitas Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya			

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Terkonservasi dan Terevitalisasi						Terkonservasi dan Terevitalisasi			
	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Publikasi		Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Publikasi	200.000.000	
	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	2	Orang		Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	2 Orang	20.000.000	
	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	3000	Buku		Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	3000 Buku	120.000.000	
	Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	400	Peserta Didik		Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Peserta Didik	300.000.000	

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	3000	Dokumen		Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	3000 Dokumen	120.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Jumlah Pelaksanaan Event Budaya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	20	Event	4.400.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Jumlah Pelaksanaan Event Budaya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	20	3.100.000.000	
			Persentase Desa Budaya yang Aktif (Existing 5 Desa Budaya)	100	Persentase				Persentase Desa Budaya yang Aktif (Existing 5 Desa Budaya)	100		
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksana pelestarian Seni dan Tradisi budaya lokal yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelakunya	12	kegiatan	4.400.000.000	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksana pelestarian Seni dan Tradisi budaya lokal yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelakunya	12	2.100.000.000	
	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan	2	Objek	4.100.000.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan,	63 Objek	1.600.000.000	Target Bertambah, pagu anggaran bertambah. (meningkatkan pelestarian budaya)

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Pengembangan Pemanfaatan						Pengembangan dan Pemanfaatan			
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Tradisional	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan	20	Orang	300.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	41 Orang	500.000.000	Target Bertambah, pagu anggaran bertambah. (meningkatkan SDM pelestarian budaya)
							Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksana pelestarian Seni dan Tradisi budaya lokal yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelakunya	13 Kegiatan	1.000.000.000	
							Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	1.000.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Presentase Lembaga Seni Budaya Yang Aktif	70 %	presentase	1.950.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Presentase Lembaga Seni Budaya Yang Aktif	70%	550.000.000	

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pelestarian kesenian daerah yang meningkatkan kesejahtera an masyarakat dan pelakunya	12	kegiatan	1.950.000.000	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pelestarian kesenian daerah yang meningkatkan kesejahtera an masyarakat dan pelakunya	13	550.000.000	
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	50	Orang	900.000.000	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	50 Orang	300.000.000	Target Bertambah, pagu anggaran bertambah. (meningkatkan pelestarian budaya)
	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	20	Sertifikat	1.050.000.000	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	20 Sertifikat	250.000.000	Target Bertambah, pagu anggaran berkurang. (meningkatkan pelestarian budaya)
							Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	88 Lembaga		Sub kegiatan Baru untuk meningkatkan SDM Kesenian

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Presetase Sejarah lokal yang dilestarikan	###	persentase	-	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Prosetase Sejarah lokal yang dilestarikan	72.65 Persen	100.000.000	
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pelestarian sejarah tradisi dan budaya lokal	14	kegiatan	-	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pelestarian sejarah, tradisi dan budaya lokal	14 Kegiatan	100.000.000	
	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	30	Dokumen	-	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	100.000.000	Target Bertambah, pagu anggaran bertambah. (Penunjang Dokumen IKU Indeks Kebudayaan)
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Persentase Cagar Budaya yang dipelihara (Berdasarkan SK Penetapan)	###	persentase	650.000.000	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Persentase Cagar Budaya yang dipelihara (Berdasarkan SK Penetapan)	100%	1.900.000.000	
			Presentase Penetapan Cagar Budaya Potensial (SK Bupati)	###	persentase				Presentase Penetapan Cagar Budaya Potensial (SK Bupati)	9,55		
			Presentase Museum yang dikelola oleh Pemda (2 Museum)	###	persentase				Presentase Museum yang dikelola oleh Pemda (2 Museum)	100%		
	Penetapan Cagar Budaya		Terlaksananya perlindunganpengembangan	12	cagar budaya	150.000.000	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Terlaksananya perlindungan, pengembangan,	16 Lokasi	400.000.000	

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Peringkat Kabupaten/Kota		pemanfaatan Cagar Budaya yang telah di tetapkan						pemanfaatan Cagar Budaya yang telah di tetapkan			
	Penetapan Cagar Budaya	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2	Objek	150.000.000	Penetapan Cagar Budaya	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	15 Objek	400.000.000	Target Bertambah, pagu anggaran bertambah. (Penunjang IKK)
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Terlaksananya pelestarian Cagar Budaya yang sudah ditetapkan	12	cagar budaya	500.000.000	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Terlaksananya pelestarian Cagar Budaya yang sudah ditetapkan	16 Lokasi	1.500.000.000	
	Pelindungan Cagar Budaya	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	5	Objek	200.000.000	Pelindungan Cagar Budaya	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	2 Objek	200.000.000	Target Bertambah, pagu anggaran bertambah. (Penunjang IKK)
	Pengembangan Cagar Budaya	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	8	Objek	300.000.000	Pengembangan Cagar Budaya	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	9 Objek	1.300.000.000	Target Bertambah, pagu anggaran bertambah. (Penunjang IKK)
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		Persentase musuem yang dikelola	###	persentase	-	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		Persentase musuem yang dikelola	75.98%	400.000.000	

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD							Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		Terlaksananya pengelolaan koleksi museum	2	museum	-	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		Terlaksananya pengelolaan koleksi museum	2 Lokasi	400.000.000	
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	2	Unit	-	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	200.000.000	
	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	2	Unit	-	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	2 Unit	200.000.000	Sub Kegiatan Baru untuk meningkatkan Sarana Prasarana Museum
	Total					1.031.992.691.540	Total				1.486.242.054.327	

MATRIK KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI KARTANEGARA

Unit Organisasi : 1-01.2-22.0-00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	DATA				Penjelasan	Keterangan
							Target	Anggaran	Lokasi	Tahun		
1	01	02	2.01 02		Penambahan Ruang Kelas Baru							
						Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 018 Tenggarong	4	2.649.255.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Pembangunan Ruang Kelas baru SD Negeri 012 Tenggarong	3	1.857.207.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 007 Tenggarong Seberang	4	2.638.880.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 029 Samboja	4	2.500.000.000		2016	Sekolah Terbakar	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	DATA				Penjelasan	Keterangan
							Target	Anggaran	Lokasi	Tahun		
						Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 014 Kenohan	3	1.000.000.000		2021	Sekolah Terbakar	
1	01	02	2.01 06		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Lanjutan Pembangunan Pagar SDN 008 Tenggarong	1	232.766.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Pembangunan Pagar SDN 027 Tenggarong Seberang	1	232.449.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Semenisasi/Paving Blok Halaman SDN 034 Muara Kaman	1	225.374.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
1	01	02	2.01 08		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	DATA				Penjelasan	Keterangan
							Target	Anggaran	Lokasi	Tahun		
						Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SDN 002 Tenggarong	3	1.158.832.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 018 Muara Badak	3	224.837.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 007 Muara Jawa	3	2.631.821.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 010 Tenggarong	3	1.656.621.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 012 Loa Kulu	3	1.046.980.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	DATA				Penjelasan	Keterangan
							Target	Anggaran	Lokasi	Tahun		
						Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 016 Loa Kulu	3	3.939.721.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 023 Tenggarong	3	2.456.141.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 025 Loa Kulu	3	1.446.987.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Rehabiltasi Total Ruang Kelas SDN 019 Loa Kulu	3	1.446.987.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Rehabiltasi Total Ruang Kelas SDN 020 Anggana	3	1.440.567.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	DATA				Penjelasan	Keterangan
							Target	Anggaran	Lokasi	Tahun		
						Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 004 Tenggarong	6	4.250.096.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 016 Sanga - Sanga	2	224.809.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Rehabiltasi Toilet Murid dan Guru SDN 024 Tenggarong	2	232.766.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 032 Tenggarong	3	1.071.822.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Lanjutan Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 018 Samboja	3	224.809.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	DATA				Penjelasan	Keterangan
							Target	Anggaran	Lokasi	Tahun		
						Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SDN 020 Tenggarong	3	1.458.262.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SDN 001 Kembang Janggut	3	1.435.887.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 018 Anggana	3	1.440.567.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 021 Tenggarong	4	2.650.994.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 022 Samboja	5	2.430.821.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	DATA				Penjelasan	Keterangan
							Target	Anggaran	Lokasi	Tahun		
						Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Pembangunan Pagar SDN 021 Kota Bangun	3	1.625.810.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 026 Tenggarong	1	250.000.000			Ruang Kelas Dalam Kondisi tidak Layak pakai	
1	01	02	2.01 05		Pembangunan Perpustakaan Sekolah							
						Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 034 Tenggarong	1	232.766.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
1	01	02	2.01 03		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
						Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah SDN 014 Tenggarong	1	232.766.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	DATA				Penjelasan	Keterangan
							Target	Anggaran	Lokasi	Tahun		
					Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD							
						Pembangunan ruang kelas sekolah TKN 02 Kenohan	2 Ruang	622.092.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Pembangunan ruang kelas sekolah TKN 02 Samboja	2 Ruang	803.879.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Pembangunan ruang kelas sekolah TKN 01 Muara Wis	1 Ruang	394.395.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Pembangunan ruang kelas sekolah TKN 01 Kenohan	2 Ruang	805.283.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	DATA				Penjelasan	Keterangan
							Target	Anggaran	Lokasi	Tahun		
						Pembangunan Gedung Sekolah TK Panca Dharma Tenggarong Seberang	1 Ruang	355.164.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya TK Negeri Pembina Muara Jawa	1 Ruang	393.499.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya TK Negeri Pembina Tenggarong	1 Ruang	391.061.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Pembangunan Ruang Guru TK IT An Nur Sebulu (Bankeu Provinsi Tahun 2021)	1 Ruang	135.700.000		2021	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Pengawasan Pembangunan Ruang Guru TK IT An Nur Sebulu (Bankeu Provinsi Tahun 2021)	1 Ruang	16.879.401		2021	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	DATA				Penjelasan	Keterangan
							Target	Anggaran	Lokasi	Tahun		
						Pembangunan Ruang Kelas Beserta perabotnya Taman Kanak-Kanak Kuntum Melati Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman	1 Ruang	135.930.000		2021	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Beserta perabotnya Taman Kanak-Kanak Kuntum Melati Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman	1 Ruang	14.394.987		2021	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Pembangunan Ruang Kelas TK ABA 1 Kec. Tenggarong Seberang	1 Ruang	135.930.000		2021	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas TK ABA 1 Kec. Tenggarong Seberang	1 Ruang	14.394.987		2021	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	DATA				Penjelasan	Keterangan
							Target	Anggaran	Lokasi	Tahun		
						Pembangunan Ruang Kelas TK ABA 2 Kec. Tenggarong Seberang	1 Ruang	135.930.000		2021	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas TK ABA 2 Kec. Tenggarong Seberang	1 Ruang	14.394.987		2021	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD							
						Pembangunan Pagar TK Negeri 1 Sebulu	1 Sekolah	216.316.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Pembangunan Halaman TKN Pembina Muara Muntai	1 Sekolah	355.869.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Pembangunan Halaman TKN 04 Tenggarong	1 Sekolah	354.381.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	DATA				Penjelasan	Keterangan
							Target	Anggaran	Lokasi	Tahun		
											dan Pengawasan)	
						Pembangunan Halaman TKN 02 Tenggarong seberang	1 Sekolah	355.485.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Pembangunan Halaman TKN Pembina Tenggarong Seberang	1 Sekolah	355.485.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD							
						Rehabilitasi ruang kelas TKN Pembina Tenggarong	2 Ruang	435.257.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	DATA				Penjelasan	Keterangan
							Target	Anggaran	Lokasi	Tahun		
					Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
						Pembangunan Pagar SKB Tenggarong	1 Sekolah	435.257.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Pembangunan Halaman SKB Muara Jawa	1 Sekolah	436.577.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah Nonformal/Kesetaraan Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
						Pembangunan Perpustakaan / Taman Baca Masyarakat (TBM) SKB Muara Jawa	1 Sekolah	261.404.440		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	DATA				Penjelasan	Keterangan
							Target	Anggaran	Lokasi	Tahun		
						Pembangunan Perpustakaan / Taman Baca Masyarakat (TBM) SKB Kota Bangun	1 Sekolah	261.360.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
					Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
						Pembangunan Rumah Dinas / Mess Guru SKB Kota Bangun	1 Unit	309.213.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
						Pembangunan Asrama Warga Belajar beserta perabotnya SKB Kota Bangun	1 Unit	437.268.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
					Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas Sekolah	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 2 Loa Kulu	4 Ruang	3.000.000.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	DATA				Penjelasan	Keterangan
							Target	Anggaran	Lokasi	Tahun		
					Pembangunan Sarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Turap SMP Negeri 6 Tenggarong	1 Sekolah	5.000.000.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
					Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Pembangunan USB SMP Negeri 8 Muara Badak	8 Ruang	7.062.268.400		2021	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
					Pembangunan Sarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Pagar SMPN 7 Muara Badak	1 Sekolah	250.000.000		2020	KDP (Perencanaan terealisasi, Fisik dan Pengawasan)	
					JUMLAH			70.442.668.202				

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat diperoleh melalui adanya Adanya musrenbang di kecamatan dan Forum Organisasi Perangkat Daerah antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pihak Kecamatan serta setkhoder lainnya.

Adanya beberapa usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang kurang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan perlu adanya keselarasan terhadap Sasaran Target yang ingin dicapai. Berdasarkan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dirumuskan di atas, adalah sebagaimana tertera dalam Tabel TC-32 di bawah.

Tabel TC-32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	Pemasangan Paving Halaman Sekolah	SDN 036 Samboja		1 Paket	
2	Pembuatan Turap Keliling Sekolah	SDN 038 Samboja		1 Paket	
3	Rehab Total Bangunan Sekolah Dasar (SDN. 014 Kelurahan Handil Baru Darat)		Rehabilitasi Ruang Kelas	1 Paket	
4	Pembangunan/Rehap Gedung SD 025 3 Kelas	Kota Bangun II	Pembangunan Ruang Kelas SD		
5	Pembangunan/Rehap Leb Komputer SDN 017	Kota Bangun II SDN 017	Pembangunan Ruang Kelas SD		
6	Pembangunan/Rehap Ruang Kelas Baru 3 Kelas SDN 026	Kota Bangun III SDN 026	Pembangunan Ruang Kelas SD		
7	REHAP RUANG KELAS BELAJAR	Desa Kota Bangun III,	Pembangunan Ruang Kelas SD		

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	SDN 018 DESA KOTA BANGUN III	Kab. Kutai Kartanegara			
8	PENAMBAHAN RUANG KELAS BELAJAR SDN 027 DESA KOTA BANGUN III	Desa Kota Bangun III, Kab. Kutai Kartanegara	Pembangunan Ruang Kelas SD		
9	REHAP RUANG KELAS BELAJAR SDN 027 DESA KOTA BANGUN III	Desa Kota Bangun III, Kab. Kutai Kartanegara	Pembangunan Ruang Kelas SD		
10	Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara/Lapangan Voly/Futsal SD SDN 017	Kota Bangun II SDN 017	Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara SD		
11	Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara SDN 026	Desa Kota Bangun III, Kab. Kutai Kartanegara	Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara SD		
12	SEMENISASI HALAMAN SEKOLAH SDN 018 DESA KOTA BANGUN III	Desa Kota Bangun III, Kab. Kutai Kartanegara	Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara SD		
13	PEMASANGAN PAVING SDN 027 DESA KOTA BANGUN III	Desa Kota Bangun III, Kab. Kutai Kartanegara	Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara SD		
14	PEMBANGUNAN LAPANGAN VOLLY SDN 027 DESA KOTA BANGUN III	Desa Kota Bangun III, Kab. Kutai Kartanegara	Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara SD		
15	PEMBANGUNAN LAPANGAN BASKET SDN 027 DESA KOTA BANGUN III	Desa Kota Bangun III, Kab. Kutai Kartanegara	Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara SD		
16	Pembangunan Pagar SD 017	Kota Bangun II SDN 017	Pembangunan Pagar SD		

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
17	LANJUTAN PEMBANGUNAN PAGAR SDN 027 DESA KOTA BANGUN III	Kota Bangun III SDN 027	Pembangunan Pagar SD		
18	Pembangunan Pagar SD 026	Kota Bangun III SDN 026	Pembangunan Pagar SD		
19	REHAP WC SISWA SDN 018 DESA KOTA BANGUN III	Desa Kota Bangun III, Kab. Kutai Kartanegara	Pembangunan Toilet Siswa/Guru SD		
20	REHAP WC GURU SDN 018 DESA KOTA BANGUN III	Desa Kota Bangun III, Kab. Kutai Kartanegara	Pembangunan Toilet Siswa/Guru SD		
21	REHAP WC SISWA SDN 027 DESA KOTA BANGUN III	Desa Kota Bangun III, Kab. Kutai Kartanegara	Pembangunan Toilet Siswa/Guru SD		
22	REHAP WC GURU SDN 027 DESA KOTA BANGUN III	Desa Kota Bangun III, Kab. Kutai Kartanegara	Pembangunan Toilet Siswa/Guru SD		
23	PEMBANGUNAN RUANG KELAS SDN 005 SAMBOJA				
24	Program Guru Penggerak PAUD (Mandiri	Samarinda, Kutai Kartanegara	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	30 orang	
25	Program Kemitraan satuan Pendidikan PAUD	Jogjakarta dan Tenggarong	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	12 sekolah	
26	Pembangunan RAS bagian dari RKB untuk TK	Desa Sungai Lunuk Tabang	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1 unit	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
27	Pembangunan RAS bagian dari RKB untuk TK	Desa Muara Nggelam Muara Wis	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1 unit	
28	Pembangunan RAS bagian dari RKB untuk TK	Desa Sepatin Kec. Anggana	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1 unit	
29	Pembangunan RAS bagian dari RKB untuk TK	Desa Bunga Jadi Kec. Muara Kaman	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1 unit	
30	Pembangunan Pagar Tk Mawar Darud Da Wah Wal-Irsyad Muara Jawa	Muara Jawa	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	1 unit	
31	Pembangunan RKB SKB Tenggarong	Tenggarong	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	4 unit	
32	Pembangunan USB SKB Muara Badak	Muara Badak	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1 unit	
33	Pembangunan USB SKB Samboja	Samboja	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1 unit	
34	Pembangunan ruang praktik beserta perabotnya SKB TENGGARONG	Tenggarong	Pembangunan Ruang Laboratorium	2 unit	
35	Pembangunan taman bacaan masyarakat (TBM) beserta perabotnya SKB TENGGARONG	Tenggarong	Penataan Ruang/Sudut Baca	1 unit	
36	Pembangunan Ruang Kantor SKB Tenggarong	Tenggarong	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	1 unit	
37	Pembangunan Ruang Toilet SKB Tenggarong	Tenggarong	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	4 unit	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
38	Pembangunan RKB TK Negeri 2 Marangkayu	Marangkayu	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2 ruang	
39	Pembangunan RKB TK Negeri 2 Sebulu	Sebulu	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2 ruang	
40	Pembangunan RKB TK Negeri 3 Sebulu	Sebulu	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2 ruang	
41	Pembangunan RKB TK Negeri 3 Kembang Janggut	Kembang Janggut	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2 ruang	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional merupakan kebijakan pemerintah secara umum, penyusunan Kebijakan Nasional diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan Nasional dengan potensi sumber daya yang ada, sehingga akan terwujud pembangunan yang efisien, efektif dan berhasil guna. Adanya kebijakan khusus dari Kemendikbudristek tentang Program Transisi PAUD ke SD, Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak dan Transpormasi Digitalisasi Pendidikan.

Kebijakan umum disusun sebagai bagian dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, layanan Publik dan daya saing sebagaimana amanat otonomi daerah, serta meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan serta mewujudkan supremasi hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan serta tindakan-tindakan tertentu yang mengandung persepsi dan tekanan khusus yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan kebijakan tiak tidak lepas dari penilaian keterkaitan antara Visi, misi dan isu-isu strategis yang telah ditentukan

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan setiap Dinas dan lembaga teknis daerah secara terintergrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja - PD

a. Tujuan

Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dalam urusan Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan
2. Meningkatkan Akses Dan Kualitas Layanan Pendidikan.

3. Meningkatkan Pelestarian dan pengelolaan kekayaan serta keragaman nilai budaya.

b. Sasaran

Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dalam urusan Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas.
2. Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Garis besar faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Rumusan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Renja-PD tahun 2024 sesuai dengan RKPD.
2. Adanya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.
3. Program Transisi PAUD ke SD.
4. Program Sekolah Penggerak.
5. Program Guru Penggerak.
6. Transpormasi Digitalisasi Pendidikan.
7. Penanganan Kemiskinan melalui Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C serta Pendidikan Kecakapan Hidup.
8. Penanganan Stunting melalui Program Pelaksanaan Kelas Parenting.
9. Adanya upaya pemerataan akses pendidikan yang terjangkau di daerah 3T. (pemerataan akses pendidikan yang terjangkau di setiap Kecamatan).
10. Adanya upaya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di setiap sekolah.
11. Adanya peningkatan partisipasi pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

TABEL TC. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai	1.241.176.043.127			75 Nilai	692.860.654.640		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	8 Dokumen	1.000.000.000			8 Dokumen	750.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
1.01.01.2.01.0008	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000				-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1	50.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.0009	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	250.000.000				-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		1	250.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.0010	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000				-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1	50.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	450.000.000			2 Dokumen	350.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Renstra		1	250.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Renja		1	150.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Renja Perubahan		1	50.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50.000.000			3 Dokumen	200.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3	50.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				- Manajemen Resiko - Evaluasi Kinerja Triwulan (E-Pantau) - LKJIP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	150.000.000			1 Dokumen	150.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyusunan Dokumen Laporan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah		1	150.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA, Luar Daerah,				Pelaksanaan Rapat Koordinasi/konsolidasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	71894 Dokumen	1.131.634.564.763			71894 Dokumen	583.544.176.276		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71892 Orang/bulan	1.131.159.564.763			71892 Orang/Bulan	582.944.176.276		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Serta PPPK		71892	1.131.159.564.763	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				pagu penyesuaian BPKAD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	250.000.000			1 Dokumen	150.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun		1	250.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA, Luar Daerah,				Pelaksanaan Rapat Koordinasi/konsolidasi (Pagu awal 150000000) berubah menjadi 250000000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	1 Laporan	200.000.000			1 Dokumen	450.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Bulanan		1	200.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA, Luar Daerah,				Pelaksanaan Rapat Koordinasi/konsolidasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000				-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1	25.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Aset Perangkat Daerah	964 Dokumen	275.000.000			964 Dokumen	300.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000				-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1	25.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	50.000.000				-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0	50.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	100.000.000			36 Laporan	100.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Sekolah		36	100.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100.000.000			928 Laporan	200.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyusunan Laporan Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		1	100.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Efisiensi dan ketersediaan angggaran pagu awal dari 200000000 menjadi 100000000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pegawai PNS dan Non PNS Perangkat Daerah	771 Orang	750.000.000			771 Orang	750.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	560 Dokumen	150.000.000			560 Orang	150.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pendistribusian SK Kenaikan Pangkat JFT dan JFU		560	150.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA, Luar Daerah,				Mendistribusikan SK PAK yang bersangkutan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	70 Dokumen	200.000.000			70 Orang	200.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Monitoring dan Evaluasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memerlukan Tindakan		70	200.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA, Luar Daerah,				Mengevaluasi seluruh ASN Baik mengenai jumlah ASN maupun ASN yg bermasalah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	150.000.000			43 Orang	150.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Mengenai E- Kinerja Pegawai		45	150.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Melakukan SosialisasiMengenai E- Kinerja Pegawai Kepada ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	98 Orang	250.000.000			98 Peserta	250.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Bimbingan Teknis Nasional Tentang Angka Kredit , Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional Guru		98	250.000.000	Luar Daerah,				Memfasilitasi Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti Kegiatan Tentang Angka Kredit , Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional Guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	23708 Orang/Bulan	1.665.000.000			23708 Orang/Bulan	1.665.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000			25 Buah	50.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Komponen Listrik/Penerangan Gedung Kantor		1	50.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	450.000.000			165 Buah	450.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Pengadaan Alat Tulis Kantor		1	450.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	300.000.000			4500 Buah	300.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Alat Kebersihan		1	300.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	75.000.000			15500 Lembar	75.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1	75.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	700 Dokumen	90.000.000			700 Media	90.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		700	90.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	100.000.000			100 Orang	100.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		100	100.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	218 Laporan	400.000.000			218 Orang	400.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		218	400.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	200.000.000			2500 Buah	200.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Penyusunan Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		5	200.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	30 Unit	390.000.000			30 Unit	390.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	390.000.000			30 Unit	390.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		30	390.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	6335 Buah	104.736.478.364			6335 Buah	104.736.478.364		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1.250.000.000			4 Bulan	1.250.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Pembayaran Air, Listrik, Internet, Telpon		4	1.250.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	100.000.000			200 Unit	100.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4	100.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6131 Laporan	103.386.478.364			6131 Orang	103.386.478.364		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembayaran Gaji THL dan Insentif Non PNS		6131	103.386.478.364	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Pembayaran Gaji THL Serta Insentif Non PNS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana Prasarana yang dilakukan pemeliharaan	528 Unit	725.000.000			528 Unit	725.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	125.000.000			10 Buah	125.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		10	125.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	480 Unit	75.000.000			480 Unit	75.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembayaran Pajak dan Pergantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		480	75.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	200.000.000			30 Unit	200.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Perbaikan Peralatan Kantor (AC, Printer, Komputer dan Lain-lainnya)		30	200.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	25.000.000			3 Sistem	25.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Perbaikan Komponen Instalasi Serve dan Jaringan Internet Kantor		3	25.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	300.000.000			5 Unit	300.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Ruang Serba Guna		5	300.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1) Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD 2) Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP 3) Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) PAUD 4) Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetaraan 5) Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar IDAMAN Pendidikan Dasar	1) 89.71 Persen 2) 88.71 Persen 3) 83.02 Persen 4) 68.38 Persen 5) 3000 Orang	237.016.011.200			1) 90.71 Persen 2) 89.71 Persen 3) 83.92 Persen 4) 69.28 Persen 5) 3000 Orang	360.098.763.800		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1) Standar kompetensi lulusan Pendidikan Sekolah Dasar 2) Standar isi Pendidikan Sekolah Dasar 3) Standar proses Pendidikan Sekolah Dasar 4) Standar sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Dasar 5) Standar pengelolaan	1) 92.94 Persen 2) 88.65 Persen 3) 95.23 Persen 4) 85.65 Persen 5) 98.23 Persen 6) 76.23 Persen 7) 89.08	107.543.807.000			1) 93.89 Persen 2) 89.60 Persen 3) 96.18 Persen 4) 86.60 Persen 5) 99.18 Persen 6) 77.18 Persen 7) 90.03	202.501.453.040		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
		Pendidikan Sekolah Dasar 6) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar 7) Standar pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar 8) Standar penilaian Pendiidkan Sekolah Dasar	Persen 8) 86.08 Persen				Persen 8) 87.03 Persen			
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	900 Dokumen	700.000.000				-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sosialisasi Kelas Parenting PAUD Terkait Stunting dan Transisi PAUD ke SD		900	700.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Lokus : 20 Kecamatan / Sasaran Orang Tua, Guru, Kepala Sekolah PAUD dan SD Kelas Awal (Kelas I dan II) Catatan P2EPD : Bentuk	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
									kegiatannya seperti apa?	
1.01.02.2.01 .0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	300.000.000				-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehabilitasi Musholla Sekolah SDN 027 Jl. Salak Desa Manunggal Jaya, Kab. Kutai Kartanegara		1	300.000.000	Manunggal Jaya,				Bangunan yang tidak memadai sehingga di perlukannya rehab bangunan - - ALIF TURIADI,SE	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01 .03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	1.500.000.000			20 Ruang	5.300.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SDN 037 Samboja		1	375.000.000	Samboja,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SDN 011 Anggana		1	375.000.000	Anggana,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SDN 010 Anggana		1	375.000.000	Anggana,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SDN 013 Loa Janan		1	375.000.000	Loa Janan,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01 .04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	400.000.000			2 Ruang	5.040.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Ruang UKS SDN 037 Samboja		1	200.000.000	Samboja,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Ruang UKS SDN 004 Muara kaman		1	200.000.000	Muara Kaman,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
1.01.02.2.01 .05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	7 Ruang	2.685.000.000			10 Ruang	2.685.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SDN 037 Samboja		1	400.000.000	Samboja,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SDN 030 Muara Kaman		1	400.000.000	Muara Kaman,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SDN 005 Loa Janan		1	400.000.000	Loa Janan,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SDN 002 Loa Janan		1	400.000.000	Loa Janan,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SDN 007 Loa Janan		1	400.000.000	Loa Janan,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SDN 013 Loa Janan		1	400.000.000	Loa Janan,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SDN 026 Loa Janan		1	285.000.000	Loa Janan,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01 .06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	22 Unit	5.795.000.000			5 Unit	14.175.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Pagar SDN 011 Tabang		1	375.000.000	Tabang,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Semenisasi Halaman SDN 002 Anggana		1	500.000.000	Anggana,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Toilet SDN 016 Loa Janan		1	250.000.000	Loa Janan,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Semenisasi Halaman SDN 006 Desa Loa Lepu Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara		1	250.000.000	Loa Lepu,				Agar tidak becek dilakukan Semenisasi Halaman SDN 006 Desa Loa Lepu Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara -- AINI FARIDA, SE	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Pagar SDN 006 Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara		1	250.000.000	Loa Lepu,				Meningkatkan keamanan sekolah diperlukan Lanjutan Pembangunan Pagar SDN 006 Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara -- AINI FARIDA, SE	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Pembangunan Pagar SDN 027 Jl. Salak Desa Manunggal Jaya, Kab. Kutai Kartanegara		1	260.000.000	Manunggal Jaya,				Kondisi pagar yang rusak berat sehingga di perlukan pembangunan pagar yang baru -- ALIF TURIADI,SE	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Semenisasi Halaman SDN 001 Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara		1	260.000.000	Loa Kulu,				Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara SD -- H. AHMAD YANI, ST.,M.Si	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Semenisasi halaman SDN 003 Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara		1	260.000.000	Loa Kulu,				Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara SD -- H. AHMAD YANI, ST.,M.Si	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Pagar SDN 016 Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara		1	260.000.000	Loa Kulu,				Pembangunan Pagar SD -- H. AHMAD YANI, ST.,M.Si	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Pagar SDN 008 Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara		1	260.000.000	Loa Janan,				Pembangunan Pagar SD -- H. AHMAD YANI, ST.,M.Si	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Semenisasi halaman Sekolah SDN 004 Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara		1	260.000.000	Loa Kulu,				Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara SD -- H. AHMAD YANI, ST.,M.Si	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Semenisasi halaman Sekolah SDN 005 Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara		1	260.000.000	Loa Kulu,				Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara SD -- H. AHMAD YANI, ST.,M.Si	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Semenisasi halaman Sekolah SDN 007 Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara		1	260.000.000	Loa Kulu,				Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara SD -- H. AHMAD YANI, ST.,M.Si	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Semenisasi halaman Sekolah SDN 009 Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara		1	260.000.000	Loa Kulu,				Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara SD -- H. AHMAD YANI, ST.,M.Si	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Pagar Sekolah SDN 013 Kec. Loa Janan , Kab. Kutai Kartanegara		1	260.000.000	Loa Janan,				Pembangunan Pagar SD -- H. AHMAD YANI, ST.,M.Si	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Pembangunan Pagar Sekolah SDN 020 Kec. Loa Janan , Kab. Kutai Kartanegara		1	260.000.000	Loa Janan,				Pembangunan Pagar SD -- H. AHMAD YANI, ST.,M.Si	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Pagar Sekolah SDN 024 Kec. Loa Janan , Kab. Kutai Kartanegara		1	260.000.000	Loa Janan,				Pembangunan Pagar SD -- H. AHMAD YANI, ST.,M.Si	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Semenisasi halaman Sekolah SDN 003 Kec. Loa Janan , Kab. Kutai Kartanegara		1	220.000.000	Loa Janan,				Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara SD -- H. AHMAD YANI, ST.,M.Si	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Semenisasi halaman Sekolah SDN 004 Kec. Loa Janan , Kab. Kutai Kartanegara		1	220.000.000	Loa Janan,				Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara SD -- H. AHMAD YANI, ST.,M.Si	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Semenisasi halaman Sekolah SDN 010 Kec. Loa Janan , Kab. Kutai Kartanegara		1	200.000.000	Loa Janan,				Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara SD -- H. AHMAD YANI, ST.,M.Si	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Semenisasi halaman Sekolah SDN 007 Kec. Loa Janan , Kab. Kutai Kartanegara		1	200.000.000	Loa Janan,				Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara SD --	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
									H. AHMAD YANI, ST.,M.Si	
	Pembangunan Toilet Siswa/Guru SDN 007 Desa Sepakat Kecamatan loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara		1	210.000.000	Sepakat,				Perlu adanya Pembangunan Toilet bagi guru dan siswa di SDN 007 Desa Sepakat -- QURAIS ISMAIL	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01 .09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	300.000.000				-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehab Pembangunan Toilet SDN 015 Kec. Loa Kulu , Kab. Kutai Kartanegara		1	300.000.000	Loa Kulu,				Rehab Pembangunan Toilet Sekolah -- H. AHMAD YANI, ST.,M.S	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01 .13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	3.000.000.000				-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN 015 Anggana		1	500.000.000	Anggana,				Termasuk Dalam Proyek Strategis Daerah Untuk Membantu Pelaksanaan Penunjang Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN 015 Anggana		1	500.000.000	Anggana,				Termasuk Dalam Proyek Strategis Daerah Untuk Membantu Pelaksana Penunjang Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN 006 Kembang Janggut		1	500.000.000	Kembang Janggut,				Termasuk Dalam Proyek Strategis Daerah Untuk Membantu Pelaksana Penunjang Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN 018 Muara Kaman		1	500.000.000	Muara Kaman,				Termasuk Dalam Proyek Strategis Daerah Untuk Membantu Pelaksana	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
									Penunjang Pendidikan	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN 017 Anggana		1	500.000.000	Anggana,				Termasuk Dalam Proyek Strategis Daerah Untuk Membantu Pelaksana Penunjang Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas SDN 012 Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara		1	500.000.000	Muara Kaman,				KAMARUR ZAMAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01 .14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1500 Paket	2.550.000.000			1500 Set	92.841.253.040		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Meubelair Siswa		1500	2.550.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	5.260.000.000				-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Papan Tulis Digital		1	2.000.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Termasuk Dalam Proyek Strategis Daerah Untuk Membantu Pelaksana Penunjang Pendidikan Sebanyak 80 unit (pengurangan dari 10 M)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Solar Cell Sekolah Dasar		1	3.000.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Termasuk Dalam Proyek Strategis Daerah Untuk Membantu Pelaksana Penunjang Pendidikan Untuk 6 sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan peralatan marching band SDN 010 Kecamatan Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara		1	260.000.000	Long Beleh Haloq,				SRI MURYANI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta Didik 2000 Peserta Didik	950.000.000			2000 Siswa	950.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Beasiswa Kukar Idaman		2000	950.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1139 Paket	10.493.607.000				-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Chromebook dan Sarana lainnya untuk Google Reference School SD		1139	10.493.607.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Catatan : JUmlah siswa 32 x 2 x 3 = 192 , sekolah siap 40 buah = 7680, harga chromebook = 9.213.000. Sehingga total semuanya 70.755.840.000. Data semula	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
									466191660000 ------ Pengeurangan = 32 x 2 = 96 x 40 Sekolah = 3.840 unit CromeBook, sehingga alokasi menjadi Rp. 35.377.920.000,-	
1.01.02.2.01 .25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	489 Peserta Didik	750.000.000			100 Siswa 364 Siswa 25 Sekolah	750.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN), Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)		364	400.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembinaan Karakter Siswa		25	100.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Pelaksanaan GEMA Idaman Tingakt SD		100	250.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	160 Orang	240.000.000			160 Orang	240.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sosialisasi Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru		160	240.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	480 Orang	3.455.000.000			60 Orang 90 Orang 150 Orang 30 Orang	2.255.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Beasiswa S1 bagi Guru		150	800.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Pendidikan Profesi Guru (PPG)		90	605.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pendampingan Guru Penggerak dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan		60	700.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Bimtek dalam rangka Peningkatan Kompentensi Guru Inklusi SD		30	150.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Diklat Berjenjang Guru Paud Terkait Penanganan Stunting		150	1.200.000.000	Tenggarong, Kota Samarinda,				Lokus : Tenggarong, Samarinda / Sasaran Guru PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01 .28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	70 Satuan Pendidikan	250.000.000			30 Sekolah 40 Sekolah	250.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Repat Koordinasi Penataan Kelembagaan dengan Penerapan Manajemen Berbasis		70	250.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Sekolah (MBS) pada Sekolah									
1.01.02.2.01 .29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	94342 Satuan Pendidikan	68.365.200.000			94116 Siswa	40.115.200.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten (BOSKAB)		94116	40.115.200.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	BOSKAB Afirmasi		226	28.250.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01 .30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	944 Orang	550.000.000			472 Sekolah 472 Sekolah	700.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi pada Sekolah dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah		944	550.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1) Standar kompetensi lulusan Pendidikan SMP 2) Standar isi Pendidikan SMP 3) Standar proses Pendidikan SMP 4) Standar sarana dan prasarana Pendidikan SMP 5) Standar pengelolaan Pendidikan SMP 6) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP 7) Standar pembiayaan Pendidikan SMP 8) Standar penilaian Pendidikan SMP	1) 90.37 Persen 2) 85.94 Persen 3) 92.94 Persen 4) 80.80 Persen 5) 93.51 Persen 6) 76.80 Persen 7) 87.37 Persen 8) 81.51 Persen	84.044.907.200			1) 91.32 Persen 2) 86.89 Persen 3) 93.89 Persen 4) 81.75 Persen 5) 94.46 Persen 6) 77.75 Persen 7) 88.32 Persen 8) 82.46 Persen	114.314.669.300		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	750.000.000				-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Ruang Kantor SMP Negeri 3 Kelurahan Muara kembang Kec. Muara		1	750.000.000	Muara Kembang,				MUHAMAD EGO	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	jawa, Kab. Kutai Kartanegara									
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	300.000.000			1 Ruang	3.750.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan UKS SMP NEGERI 3 SEBULU		1	300.000.000	Sebulu,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	700.000.000			2 Ruang	3.500.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Laboratorum IPA/Komputer SMP NEGERI 4 MUARA WIS		1	700.000.000	Muara Wis,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	4.542.307.200			5 Unit	7.834.769.300		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Pembagunan Toilet SMP NEGERI 5 TENGGARONG SEBERANG		1	375.800.000	Tenggarong Seberang,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembagunan Toilet SMP NEGERI 3 SEBULU		1	375.850.000	Sebulu,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembagunan Toilet SMP NEGERI 5 SEBULU		1	375.850.000	Sebulu,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembuatan Pagar Sekolah SMP Negeri 2 Kelurahan Sangasanga Dalam Kecamatan Sangasanga, Kab. Kutai Kartanegara		1	2.200.000.000	Sanga-Sanga Dalam,				Pembangunan Pagar SMP -- MUHAMAD EGO	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Mushola SMP Negeri 3 Kelurahan Muara kembang Kec. Muara jawa, Kab. Kutai Kartanegara		1	750.000.000	Muara Kembang,				Rehabilitasi Musholla Sekolah -- MUHAMAD EGO	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Pagar SMPN 1 Kota Bangun Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara		1	464.807.200	Kota Bangun,				Permohonan Pembangunan Pagar -- SOPAN SOPIAN, S.Pd	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	21 Paket	1.910.000.000			1100 Set	57.237.300.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Meubelair SMP NEGERI 1 LOA KULU		3	272.857.000	Loa Kulu,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Meubelair SMP NEGERI 2 LOA JANAN		3	272.857.000	Loa Janan,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Meubelair SMP NEGERI 4 SEBULU		3	272.857.000	Sebulu,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Meubelair SMP NEGERI 1 SAMBOJA		3	272.857.000	Samboja,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Meubelair SMP NEGERI 3 SANGA SANGA		3	272.857.000	Sanga Sanga,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Pengadaan Meubelair SMP NEGERI 3 KEMBANG JANGGUT		3	272.857.000	Kembang Janggut,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Meubelair SMP NEGERI 4 MUARA BADAK		3	272.858.000	Muara Badak,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02 .27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	16 Paket	2.200.000.000				-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Alat dan Praktik Belajar untuk Sekolag 16 Sekolah GRS		16	2.200.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Jenjang SMP : 1.SMPN 7 Muara Kaman 2.SMPN 1 Tenggarong 3.SMPN 2 Tenggarong 4.SMPN 3 Tenggarong 5.SMPN 10 Loa Kulu 6. SMPN 2 Tabang 7.SMPN 3 Kembang Janggut 8.SMPN 7 Kota Bangun 9.SMPN 2 Muara Kaman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
									10.SMPN 1 Sebulu 11.SMPN 4 Tenggarong Seberang 12. SMPN 6 Loa Kulu 13. SMPN 5 Loa Janan 14. SMPN 2 Loa Janan 15. SMPN 2 Sanga Sanga 16. SMPN 7 Muara Badak	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1015 Peserta Didik	960.000.000			1015 Siswa	960.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pemberian Beasiswa Bagi Peserta Didik		1015	960.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Program Dedikasi Bupati (Beasiswa KUKAR Idaman) Bagi peserta Didik SMP yang berprestasi baik di bidang Akademik maupun Non Akademik dan Siswa Kurang Mampu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	17 Paket	42.200.000.000				-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Alat dan Praktik Belajar untuk Sekolag 16 Sekolah GRS		16	2.200.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Jenjang SMP : 1.SMPN 7 Muara Kaman 2.SMPN 1 Tenggarong 3.SMPN 2 Tenggarong 4.SMPN 3 Tenggarong 5.SMPN 10 Loa Kulu 6. SMPN 2 Tabang 7.SMPN 3 Kembang Janggut 8.SMPN 7 Kota Bangun 9.SMPN 2 Muara Kaman 10.SMPN 1 Sebulu 11.SMPN 4 Tenggarong Seberang 12. SMPN 6 Loa Kulu 13. SMPN 5 Loa Janan 14. SMPN 2 Loa Janan 15.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
									SMPN 2 Sanga Sanga 16. SMPN 7 Muara Badak	
	Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SMP		1	40.000.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				ABDUL RASID, SE.,M.Si	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	869 Peserta Didik	1.025.000.000			150 Siswa 60 Siswa 200 Siswa 20 Sekolah 400 Siswa 80 Siswa	1.050.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN)		359	350.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Program Pemerintah (Agenda Nasional), pelaksanaan bersifat lomba yang dilaksanakan dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)		150	125.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Program Pemerintah (Agenda Nasional), pelaksanaan bersifat lomba yang dilaksanakan dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)		80	125.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Program Pemerintah (Agenda Nasional), pelaksanaan bersifat lomba yang dilaksanakan dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Pelaksanaan Lomba GEMA Idaman Tingkat SMP		60	125.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Program Dedikasi Bupati berupa Lomba Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Gala Siswa Indonesia (GSI)		20	100.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Program Pemerintah (Agenda Nasional), pelaksanaan bersifat lomba yang dilaksanakan dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)		200	200.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Program Regulasi Pemerintah berdasarkan Permendikbudristek No. 56/M/2022 kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Bimtek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	325 Orang	2.470.000.000			30 Orang 10 Orang 30 Orang 20 Orang 15 Orang 110 Orang 30 Orang 30 Orang 50 Orang	2.470.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Beasiswa Kukar Idaman bagi Guru SMP		110	600.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Peningkatan Kompetensi Guru Agama Islam dalam Pelaksanaan GEMA		50	275.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sertifikasi Tenaga Laboratorium SMP		30	250.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sertifikasi Tenaga Perpustakaan SMP		30	250.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Sertifikasi Tenaga Operator SMP		30	150.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Peningkatan Kompetensi Guru Inklusif Sekolah Menengah Pertama		10	150.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pendidikan Profesi Guru SMP		15	245.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Seleksi Kepala Sekolah Menengah Pertama Unggulan		20	200.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Diklat Calon Kepala Sekolah Menengah Pertama Unggulan		30	350.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	102 Satuan Pendidikan	150.000.000			102 Sekolah	150.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Rapat Koordinasi Penataan Kelembagaan dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Sekolah		102	150.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Menuju Sekolah Unggul dan Adiwiyata	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	41000 Satuan Pendidikan	26.537.600.000			41000 Siswa	26.537.600.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pemberian Dana BOS SMP/MTs		41000	26.537.600.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Pemberian Bantuan BOS bagi sekolah SMP/MTs baik negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegra	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	390 Orang	300.000.000			195 Sekolah 195 Sekolah	300.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Bimtek Penggunaan ARKAS 4.0 Jenjang SMP		195	250.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Pelaksanaan BIMTEK Aplikasi ARKAS untuk Memudahkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
									sekolah dalam proses peng SPJ an SMP/MTs	
	Bimtek Perpajakan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Dana BOS Jenjang SMP/MTs		195	50.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Bimtek Perpajakan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Dana BOS Jenjang SMP/MTs	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan PAUD 2) Standar Isi Pendidikan PAUD 3) Standar Proses Pendidikan PAUD 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD 5) Standar Sarana Prasana Pendidikan PAUD 6) Standar Pengelolaan Pendidikan PAUD 7) Standar Pembiayaan	1) 89.83 Persen 2) 91.58 Persen 3) 98.49 Persen 4) 43.84 Persen 5) 73.98 Persen 6) 92.85 Persen 7) 83.55 Persen 8) 87.15 Persen	26.130.897.000			1) 90.78 Persen 2) 92.53 Persen 3) 99.44 Persen 4) 44.79 Persen 5) 74.93 Persen 6) 93.80 Persen 7) 84.50 Persen 8) 88.10 Persen	34.318.750.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
		Pendidikan PAUD 8) Standar Penilaian Pendidikan PAUD								
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	250.000.000				-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Lanjutan Pembangunan TK Dahlia 2 Loa Kulu Desa Jembayan Rt,02 Kecamatan Loa Kulu, Kab Kukar Kartanegara , Kab. Kutai Kartanegara		1	250.000.000	Jembayan,				MASHUDDIONO, SP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0047	PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	4899 Peserta Satuan Pendidikan	2.500.000.000				-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Fasilitasi Program Bunda PAUD (Porgram wajib PAUD 1 tahun, PAUD-HI, Transisi PAUD-SD dan Akreditasi PAUD)		514	450.000.000	Tenggarong, Kota Samarinda, Luar Daerah,				Bimtek untuk Bunda PAUD kecamatan, desa dan kelurahan se kabupaten Kutai Kartanegara	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Pendampingan IKM (Perencanaan Pembelajaran dan Pendekatan Pembelajaran)		565	400.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				(1) TOT bagi fasilitator IKM (2) Workshop bagi seluruh satuan PAUD di seluruh kecamatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Fasilitasi Pembelajaran PAUD (Budaya Refleksi Pembelajaran)		100	450.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Hasil Pemetaan sebesar Rp. 100.000.000,- Pendampingan di Kecamatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Fasilitasii PAUD HI (Pendukung Program Prevalensi Stunting)		2700	450.000.000	Tenggarong, Kota Samarinda,				(1) Worksshop untuk satuan PAUD yang menyelenggarakan PAUD-HI (2) FGD lintas OPD pendukung program PAUD-HI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kemitraan dengan orang tua : Pelaksanaan Kelas Parenting (Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, Stunting dan Wajib PAUD 1 Tahun)		900	450.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Kegiatan Sosialisasi untuk orang tua/masayarkat di 20 kecamatan terkait Program Transisi PAUD-SD, pengentasan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
									Stunting dan Wajib PAUD 1 tahun dalam upaya peningkatan capaian SPM	
	Penguatan Transisi PAUD ke SD bagi satuan pendidikan (Membangun Kemampuan Fondasi Anak Usia Dini)		120	300.000.000	Tenggarong, Kota Samarinda,				Bimtek untuk pendidik PAUD dalam rangka pengembangan kemampuan Fondasi peserta didik PAUD dalam upaya mendukung program Transisi PAUD-SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03 .02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10 Unit	2.000.000.000			5 Unit	2.475.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Toilet (Jamban) TK Negeri 01 Loa Janan		1	247.500.000	Loa Janan,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Pembangunan Toilet (Jamban) TK Negeri 02 Muara Badak		1	247.500.000	Muara Badak,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Toilet Siswa TK NEGERI 01 ANGGANA		2	244.000.000	Anggana,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Toilet Siswa TK NEGERI 01 KEMBANG JANGGUT		1	194.330.000	Kembang Janggut,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Toilet Siswa TK NEGERI 01 KENOHAN		1	316.670.000	Kenohan,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pemasangan Paving Blok TK / Paud Harapan Bunda Rt 04 Kel. Sanipah		1	250.000.000	Sanipah,				FACHRUDDIN, SE	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pemasangan Paving Blok TK Kenangan Rt 06 Kel. Sanipah		1	250.000.000	Sanipah,				FACHRUDDIN, SE	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Pemasangan Plavon TK/PAUD Anak Bangsa Dusun 2 RT 001 Desa Sebuntak Kec. Marangkayu , Kab. Kutai Kartanegara		1	250.000.000	Sebuntal,				MA''RUF MARJUNI, S.Pd	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03 .03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	685.257.000			1 Sekolah	2.310.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehabilitasi ruang kelas TKN Pembina Tenggarong (KDP)		2	435.257.000	Tenggarong,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung TK Anak Bangsa Dusun 2 RT 001 Desa Sebuntal Kec. Marangkayu, Kab. Kutai Kartanegara		1	250.000.000	Sebuntal,				MA''RUF MARJUNI, S.Pd	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03 .04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	946.460.000				-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Rehabilitasi Toilet Siswa TK NEGERI 01 TENGGARONG		1	250.000.000	Tenggarong,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehabilitasi Pagar TK NEGERI 01 SANGA-SANGA		1	446.460.000	Sanga Sanga,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehab Atap Dan Pemasangan Kanopi Tk / Paud Harapan Bunda Rt 4 Kel. Sanipah Kab. Kutai Kartanegara		1	250.000.000	Sanipah,				FACHRUDDIN, SE	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03 .07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1540 Paket	2.990.500.000			100 Buah 200 Buah 200 Set 100 Buah 40 Buah 200 Buah 500 Buah 100 Buah 100 Buah	15.320.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Mebel PAUD		940	1.895.500.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Pengadaan Mebel Siswa		200	265.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Mebel Guru		400	830.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	41 Paket	2.401.080.000				-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan APE LuarTK NEGERI 01 ANGGANA		1	75.000.000	Anggana,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan APE LuarTK NEGERI 01 KEMBANG JANGGUT		1	75.000.000	Kembang Janggut,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan APE LuarTK NEGERI 02 KEMBANG JANGGUT		1	75.000.000	Kembang Janggut,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Pengadaan APE LuarTK NEGERI 01 KENOHAN		1	75.000.000	Kenohan,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan APE LuarTK NEGERI 02 KENOHAN		1	75.000.000	Kenohan,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan APE LuarTK NEGERI 01 KOTA BANGUN		1	75.000.000	Kota Bangun,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan APE LuarTK NEGERI 01 LOA JANAN		1	75.000.000	Loa Janan,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan APE LuarTK NEGERI 02 LOA JANAN		1	75.000.000	Loa Janan,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan APE LuarTK NEGERI 01 LOA KULU		1	75.000.000	Loa Kulu,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Pengadaan APE LuarTK NEGERI 01 MARANG KAYU		1	75.000.000	Marang Kayu,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan APE LuarTK NEGERI 01 MUARA BADAK		1	75.000.000	Muara Badak,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan APE LuarTK NEGERI 02 MUARA BADAK		1	75.000.000	Muara Badak,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan APE LuarTK PEMBINA MUARA JAWA		1	75.000.000	Muara Jawa,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan APE LuarTK NEGERI 01 MUARA KAMAN		1	75.000.000	Muara Kaman,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan APE LuarTK NEGERI 01 MUARA MUNTAI		1	75.000.000	Muara Muntai,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Pengadaan APE LuarTK NEGERi 01 MUARA WIS		1	75.000.000	Muara Wis,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan APE LuarTK NEGERi 02 MUARA WIS		1	75.000.000	Muara Wis,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan APE LuarTK NEGERI 01 SAMBOJA		1	75.000.000	Samboja,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan APE LuarTK NEGERI 02 SAMBOJA		1	75.000.000	Samboja,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan APE LuarTK. NEGERI 01 SANGA-SANGA		1	75.000.000	Sanga Sanga,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan APE LuarTK. NEGERI 01 SEBULU		1	75.000.000	Sebulu,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Pengadaan APE LuarTK NEGERI 01 TENGGARONG		1	75.000.000	Tenggarong,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan APE LuarTK NEGERI 03 TENGGARONG		1	75.000.000	Tenggarong,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan APE LuarTK NEGERI 04 TENGGARONG		1	75.000.000	Tenggarong,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan APE LuarTK NEGERI PEMBINA TENGGARONG		1	75.000.000	Tenggarong,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan APE LuarTK NEGERI 02 TENGGARONG		1	75.000.000	Tenggarong,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan APE LuarTK NEGERI 01 TENGGARONG SEBERANG		1	75.000.000	Tenggarong Seberang,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Pengadaan APE LuarTK NEGERI 02 TENGGARONG SEBERANG		1	75.000.000	Tenggarong Seberang,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan APE LuarTK NEGERI PEMBINA TENGGARONG SEBERANG		1	75.000.000	Tenggarong Seberang,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Laptop Administrasi SekolahTK MELATI 2 SAMBOJA BARAT		2	37.680.000	Samboja,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Laptop Administrasi SekolahKB PERMATA HATI SAMBOJA		2	37.680.000	Samboja,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Laptop Administrasi SekolahTK REA KALTIM IV KEMBANG JANGGUT		2	37.680.000	Kembang Janggut,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Laptop Administrasi SekolahTK TUNAS MULIA KOTA BANGUN		2	37.680.000	Kota Bangun,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Pengadaan Laptop Administrasi SekolahTK NUR HIKMAH MUARA MUNTAI		2	37.680.000	Muara Muntai,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Laptop Administrasi SekolahKB BUNDA GARINI SAMBOJA		2	37.680.000	Samboja,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03 .16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	456 Orang	2.475.000.000			5 Orang 441 Orang 10 Orang	2.475.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Beasiswa Kukar Idaman bagi Guru PAUD		441	2.205.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Diklat Kepala Sekolah PAUD		5	100.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan bagi Guru PAUD		10	170.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	912 Satuan Pendidikan	1.450.000.000			50 Lembaga 50 Lembaga	200.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pendampingan dan Fasilitasi Akreditasi PAUD (Peningkatan capaian SPM PAUD)		200	200.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Workshop dan pendampingan satuan PAUD dalam persiapan pelaksanaan akreditasi (capaian SPM PAUD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Fasilitasi Sekolah Ramah Anak, Sekolah Sehat dan Adiwiyata jenjang PAUD (Lingkungan Aman)		200	300.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA, Kota Samarinda,				Workshop dan penilaian sekolah ramah anak, sekolah sehat/adiwiyata	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Fasilitasi Pembinaan Penyelenggara Satuan PAUD (PP-PAUD)		250	250.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Lokakarya dan Monitoring peran penyelenggara pendidikan dalam meningkatkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
									mutu layanan PAUD	
	Pendampingan Sekolah Inklusi jenjang PAUD (Ingkungan Inkusif)		60	300.000.000	Tenggarong, Kota Samarinda,				Workshop dan Magang bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pendampingan sekolah Penggerak		2	150.000.000	Tenggarong, Sebulu,				Pendampingan bagi 2 sekolah penggerak PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Fasilitasi PAUD Holistik Integratif		200	250.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Lokus : Tenggarong, Samarinda, 20 Kecamatan / Sasaran Kepala Sekolah PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03 .18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	598 Satuan Pendidikan	10.182.600.000			19447 Siswa	6.438.750.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten (BOSKAB)		567	7.082.600.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Meningkatkan tata kelola PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	BOSKAB Afirmasi		31	3.100.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Meningkatkan tata kelola PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	564 Orang	250.000.000			564 PAUD	250.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi pada Sekolah dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah		564	250.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Kegiatan sosialisasi, verifikasi dan monitoring	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1) Standar Kompetensi Kelulusan Pendidikan Kesetaraan 2) Standar Isi Pendidikan Kesetaraan 3) Standar Proses Pendidikan Kesetaraan 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1) 68.72 Persen 2) 72.62 Persen 3) 72.58 Persen 4) 65.53 Persen 5) 67.29 Persen	19.296.400.000			1) 69.67 Persen 2) 73.57 Persen 3) 73.53 Persen 4) 66.48 Persen 5) 68.24 Persen	8.963.891.460		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
		Pendidikan Kesetaraan 5) Standar Sarana Prasana Pendidikan Kesetaraan 6) Standar Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan 7) Standar Pembiayaan Pendidikan Kesetaraan 8) Standar Penilaian Pendidikan Kesetaraan 9) Angka Melek Huruf	6) 67.58 Persen 7) 62.38 Persen 8) 67.43 Persen 9) 99.98 Persen				6) 68.53 Persen 7) 63.33 Persen 8) 68.38 Persen 9) 99.99 Persen			
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	75.000.000				-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		3	75.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	14065 Peserta Didik	7.760.000.000				-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Asesmen Nasional Berbasis Komputer		1000	300.000.000	Tenggarong, Kota Samarinda,				Sosialisasi, Bimtek dan Monitoring pelaksanaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
									ANBK sebagai instrumen Rapor Pendidikan	
	Bimtek Tutor Keaksaraan		25	100.000.000	Tenggarong, Kota Samarinda,				Peningkatan kompetensi tutor keaksaraan dalam rangka pengentasan buta aksara (capaian IKK)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Bimtek Implementasi Kurikulum		50	150.000.000	Tenggarong, Kota Samarinda,				Bimtek bagi kepala lembaga dan tutor dalam menimplemntasikan Kurikulum Merdeka	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pendidikan Kecakapan Hidup		500	300.000.000	Tenggarong, Kota Samarinda,				Biaya narasumber pelatihan kecakapan hidup, perlengkapan belajar dan peralatan bekal peserta didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Bimtek Tutor Kesetaraan (penguatan capaian literaasi dan Numerasi pendidikan kesataraan)		200	200.000.000	Tenggarong, Kota Samarinda,				Peningkatan kompetensi tutor Kesetaraan dalam uapaya peningkatan capaian indikator Literasi dan Numerasi pada rapor pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Uji Kompetensi Kesetaraan		600	300.000.000	Tenggarong, Kota Samarinda,				Sosialisasi, Bimtek dan Monitoring pelaksanaan ANBK sebagai instrumen Rapor Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	TOT Instruktur Kecakapan Hidup		60	150.000.000	Tenggarong, Kota Samarinda,				Pelatihan bagi calon instruktur sampai pada proses sertifikasi Instruktur	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kegiatan Belajar Mengajar Kesetaraan		7150	350.000.000	Tenggarong, Kota Samarinda,				Narasumber, modull dan perlengkapan belajar pelaksanaan pembelajaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
									kesetaraan dalam upaya pembebasan biaya pendidikan kesetaraan bagi peseerta didik	
	Kegiatan Belajar Mengajar Keaksaraan		250	200.000.000	Tenggarong, Kota Samarinda,				Narasumber, modull dan perlengkapan belajar pelaksanaan pembelajaran keaksaraan dalam upaya pembebasan biaya pendidikan keaksaraan bagi peseerta didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembiayaan Kegiatan Belajar Mengajar Keaksaraan Dasar		100	300.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Lokus : Kota Bangun, Anggana, Muara Badak, Muara Kaman, Kembang Janggut, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan,	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
									Samboja, Muara Jawa / Sasaran Warga Buta Aksara Dasar	
	BIMTEK Tutor Keaksaraan		100	500.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Lokus : Tenggarong, Samarinda / Sasaran Tutor Keaksaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pendidikan, Kursus dan Latihan Keterampilan / Kewirausahaan		300	800.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Lokus : Kota Bangun, Anggana, Muara Badak, Muara Kaman, Kembang Janggut, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan, Samboja, Muara Jawa / Sasaran Warga Yang Belum Bekerja	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	TOT Instruktur		100	300.000.000	Tenggarong, Kota Samarinda,				Lokus : Tenggarong dan Samarinda / Sasaran Calon	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
									Instruktur Pelatihan / Kursus	
	Fasilitasi Kelembagaan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan)		30	150.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Lokus : Tenggarong & Samarinda / Sasaran Lembaga Kursus dan Pelatihan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembiayaan proses Pembelajaran Paket-A		300	450.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Lokus : Kota Bangun, Anggana, Muara Badak, Muara Kaman, Kembang Janggut, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan, Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga / Sasaran Warga yang tidak memiliki Ijazah SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Pembiayaan proses Pembelajaran Paket-B		1300	1.210.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Lokus : Kota Bangun, Anggana, Muara Badak, Muara Kaman, Kembang Janggut, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan, Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga / Sasaran Warga yang tidak memiliki Ijazah SMP/Sederajat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembiayaan proses Pembelajaran Paket-C		2000	2.000.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Lokus : Kota Bangun, Anggana, Muara Badak, Muara Kaman, Kembang Janggut, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan, Samboja, Muara Jawa, Sanga-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
									Sanga / Sasaran Warga yang tidak memiliki Ijazah SMA/Sederajat	
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	16 set Paket	500.000.000				-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Mebel		16	500.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.0052	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PENDIDIKAN NON FORMAL	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	3 unit	675.000.000				-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SKB Muara Badak		1	225.000.000	Muara Badak,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SKB Tenggarong		1	225.000.000	Tenggarong,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SKB Muara Kaman		1	225.000.000	Muara Kaman,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04 .10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2150 Peserta Didik	2.150.000.000			200 Siswa	240.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Beasiswa Stimulan Kukar Idaman		1200	1.200.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				stimulan pengentasan putus sekolah dalam upaya penurunan angka kemiskinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembiayaan Kegiatan Belajar Mengajar Keaksaraan Lanjut		200	200.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Lokus : Kota Bangun, Anggana, Muara Badak, Muara Kaman, Kembang Janggut, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan, Samboja, Muara Jawa / Sasaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
									Warga Buta Aksara Lanjut	
	Beasiswa Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Paket A		150	150.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Lokus : Kota Bangun, Anggana, Muara Badak, Muara Kaman, Kembang Janggut, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan, Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga / Sasaran Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Beasiswa Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Paket B		200	200.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Lokus : Kota Bangun, Anggana, Muara Badak, Muara Kaman, Kembang Janggut, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
									Kulu, Loa Janan, Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga / Sasaran Peserta Didik	
	Beasiswa Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Paket C		400	400.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Lokus : Kota Bangun, Anggana, Muara Badak, Muara Kaman, Kembang Janggut, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan, Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga / Sasaran Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	135 Satuan Pendidikan	400.000.000			100 Lembaga	237.491.460		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Verifikasi Validasi Data Calon Peserta Didik		54	200.000.000	Tenggarong, Kota Samarinda,				Validasi entitas data pendidikan (satuan pendidikan, peserta didik, PTK dan sarana Prasarana) dalam upaya untuk meningkatkan kualitas data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengelolaan Manajemen Berbasis sekolah jenjang pendidikan kesetaraan (Pendampingan akreditasi satuan pendidikan)		81	200.000.000	Tenggarong, Kota Samarinda,				pembekalan satuan pendidikan dalam melaksanakan akreditasi sebagai capaian indek mutu pendidikan kesetaraan dan prasyarat mengikuti Ujian kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04 .17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	11800 Satuan Pendidikan	7.536.400.000			2574 Orang	1.936.400.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten (BOSKAB)		7750	2.136.400.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				BOS Kabupaten reguler	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	BOSKAB Afirmasi		4050	5.400.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Mengakomodir peserta didik yang tidak mendapat bantuan BOP dari Kemendikbud	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	54 Orang	200.000.000			100 Lembaga	200.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi pada Sekolah dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah		54	200.000.000	Tenggarong, Kota Samarinda,				Pendampingan pengelolaan dana BOP dan BOS Kabupaten untuk meningkatkan kualitas perencaan dan penata usahaan anggaran (27 sekolah x 2 Orang kepsek dg bendahara)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal (MuLok)	100 Persen	450.000.000			100 Persen	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1) Tersedianya kurikulum Muatan Lokal bagi jenjang pendidikan SD 2) Tersedianya kurikulum Muatan Lokal bagi jenjang pendidikan SMP 3) Tersedianya perangkat pembelajaran kurikulum muatan lokal jenjang SD 4) Tersedianya perangkat pembelajaran kurikulum muatan lokal jenjang SMP	1) 1 Dokumen 2) 1 Dokumen 3) 1 Dokumen 4) 1 Dokumen	450.000.000			1) 1 Dokumen 2) 1 Dokumen 3) 1 Dokumen 4) 1 Dokumen	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2 Dokumen	100.000.000			2 Dokumen	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Penyusunan Dokumen Kurikulum Muatan Lokal		2	100.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Program Kukar Berbudaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	2000 Buku	100.000.000			2000 Eksemplar	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Buku Teks Muatan Lokal		2000	100.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Program Kukar Berbudaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	30 Orang	250.000.000			30 Orang	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pelatihan Penyusunan Dokumen Kurikulum Muatan Lokal		30	250.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Program Kukar Berbudaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase terpenuhinya jumlah guru	95 Persen	440.000.000			97 Persen	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1) Rasio Guru dengan Peserta didik PAUD 2) Rasio Guru dengan Peserta didik SD 3) Rasio Guru dengan Peserta didik SMP	1) 80 Rasio 2) 80 Rasio 3) 80 Rasio	440.000.000			1) 90 Rasio 2) 90 Rasio 3) 90 Rasio	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	4 Dokumen	40.000.000			4 Dokumen	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetara an		4	40.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga	250 Laporan	400.000.000			250 Orang	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan								
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetara an		250	400.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Pendirian dan Operasional	100 Persen	250.000.000			100 Persen	250.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan izin pendirian dan operasional sekolah Pendidikan Dasar	61 Dokumen	50.000.000			60 Dokumen	50.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05.2.01 .01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	28 Dokumen	35.000.000			28 Lembaga	35.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Survey ke lapangan terkait penerbitan ijin pendirian sekolah		28	35.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05.2.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	30 Dokumen	15.000.000			30 Lembaga	15.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Evaluasi ke lapangan terkait ijin sekolah yang sudah diterbikan		30	15.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan izin pendirian dan operasional sekolah PAUD dan Non Formal	100 Dokumen	200.000.000			100 Dokumen	200.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	150 Dokumen	100.000.000			150 Lembaga	100.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		150	100.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	150 Dokumen	100.000.000			150 Lembaga	100.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		150	100.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Cakupan sekolah yang menggunakan bahasa daerah sebagai mata pelajaran	90 Persen	860.000.000			100 Persen	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1) Terlaksanannya program pembudayaan bahasa dan sastra daerah dijenjang sekolah SD 2) Terlaksanannya program pembudayaan bahasa dan sastra daerah dijenjang sekolah SMP 3) Jumlah penutur muda bahasa daerah 4) Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah	1) 240 Sekolah 2) 106 Sekolah 3) 3460 Orang 4) 5 Kali	860.000.000			1) 300 Sekolah 2) 106 Sekolah 3) 4060 Orang 4) 5 Kali	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.06.2.01.01	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	1000 Kamus	100.000.000			1000 Eksemplar	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kutai		1000	100.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.06.2.01.03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Publikasi	200.000.000			2 Kegiatan	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Publikasi Bahasa dan Sastra Kutai		2	200.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.06.2.01.04	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	2 Orang	20.000.000			2 Orang	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		2	20.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.06.2.01.05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	3000 Buku	120.000.000			3000 Eksemplar	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi		3000	120.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Kabupaten Kutai Kartanegara									
1.01.06.2.01.06	Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Peserta Didik	300.000.000			400 Orang	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Lomba Bahasa Kutai tingkat SD dan SMP		400	300.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.06.2.01.07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	3000 Dokumen	120.000.000			3000 Eksemplar	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Kutai		3000	120.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1) Jumlah Pelaksanaan Event Budaya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 2) Persentase Desa Budaya yang Aktif	1) 30 Event 2) 100 Persen	3.100.000.000			1) 30 Event 2) 100 Persen	4.500.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.100.000.000				-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02.2.01 .0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	65 Objek	1.600.000.000				-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Festival Budaya Erau		1	300.000.000	Tenggarong, Luar Daerah,				fasilitasi acara Adat Erau	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Fasilitasi Festival Seni budaya Daerah		1	200.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA, Luar Daerah,				Fasilitasi acarat adat dan tradisi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Hibah ke Kesultanan Kutai Kartanegara Festival Budaya Erau		1	300.000.000	Tenggarong,				Lokus : Tenggarong / Sasaran : Kesultanan Kutai Kartanegara	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Alat Kesenian Gendang Bellek Mandalika Desa Kerta Buana Kec. Tenggarong Seberang		30	200.000.000	Kerta Buana,				Penyediaan Alat Kesenian -- FIRNANDI IKHSAN, S.Pi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Alat Cilokak Pelita Harapan 2 Desa Bangun Reja Kec. tenggarong Seberang		30	200.000.000	Bangun Rejo,				Penyediaan Alat Kesenian -- FIRNANDI IKHSAN, S.Pi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan alat musik PERSATUAN BAND SEPARI NADA Jl. Darussalam RT 08 Desa Separi, Kab. Kutai Kartanegara		1	200.000.000	Separi,				Penyediaan Alat Kesenian karena belum adanya bantuan alat musik di kelompok tersebut -- ALIF TURIADI,SE	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Pengadaan alat musik PERSATUAN BAND BHINEKA BAND Jl. Darussalam RT 08 Desa Separi, Kab. Kutai Kartanegara		1	200.000.000	Separi,				Penyediaan Alat Kesenian karena belum adanya bantuan alat musik bagi kelompok tersebut -- ALIF TURIADI,SE	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02.2.01 .0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	41 Orang	500.000.000				-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pemilihan Duta Budaya		20	300.000.000	Tenggarong, Luar Daerah,				Peningkatan SDM Bidang kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Fasilitasi Penyusunan Buku berjudul "Romantik Tenggarong"		20	100.000.000	Tenggarong,				Adanya Potensi Pengembangan diri dalam Penyusunan Buku berjudul "Romantik Tenggarong" yang disusun oleh Komunitas Kreatif Nagapore dan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
									Gerakan Literasi Kutai -- QURAIS ISMAIL	
	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		1	100.000.000	Tenggarong,				Penyusunan Buku berjudul "Romantik Tenggarong" yang disusun oleh Komunitas Kreatif Nagapore dan Gerakan Literasi Kutai Pokir Qurais Ismail	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana pelestarian Seni dan Tradisi budaya lokal yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelakunya	13 Kegiatan	1.000.000.000			15 Kegiatan	4.500.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02.2.02 .01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	1.000.000.000			2 Kegiatan	4.200.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Erau Benua Tuha Sabintulung		1	1.000.000.000	Muara Kaman, Sabintulung,				Kegiatan Acara Adat yang menjadi Pelestarian Budaya khususnya Acara Erau Benua Tuha Sabintulung	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Lembaga Seni Budaya yang Aktif	75 Persen	550.000.000			80 Persen	2.050.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelestarian kesenian daerah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelakunya	13 Kegiatan	550.000.000			15 Kegiatan	2.050.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03.2.01 .01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	50 Orang	300.000.000			50 Orang	1.000.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Gerakan Seniman Masuk Sekolah		50	300.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Cakupan SDM Seni	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	20 Sertifikat	250.000.000			20 Orang	1.050.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Bimbingan Teknis SDM Seniman		20	250.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Cakupan SDM Seni	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Prosetase Sejarah lokal yang dilestarikan	75.98 Persen	100.000.000			78.67 Persen	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelestarian sejarah, tradisi dan budaya lokal	16 Kegiatan	100.000.000			20 Kegiatan	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	100.000.000			30 Orang	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		1	100.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA, Luar Daerah,				dokumen IPK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1) Persentase Cagar Budaya yang Dipelihara 2) Persentase Penetapan Cagar Budaya Potensial 3) Persentase Museum yang Dikelola oleh Pemda	1) 100 Persen 2) 14.57 Persen 3) 100 Persen	1.900.000.000			1) 100 Persen 2) 19.60 Persen 3) 100 Persen	650.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan Cagar Budaya yang telah di tetapkan	16 Lokasi	400.000.000			20 Lokasi	150.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05.2.01 .02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	15 Objek	400.000.000			2 Kawasan	150.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penetapan Objek Cagar Budaya Peringkat Kabupaten		15	400.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Lokus : 5 Kecamatan / Sasaran Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelestarian Cagar Budaya yang sudah ditetapkan	16 Lokasi	1.500.000.000			20 Lokasi	500.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05.2.02 .01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	2 Objek	200.000.000			5 Buah	200.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sosialisasi Tentang Cagar Budaya		1	100.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				Konsultasi dan Koordinasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Wokshop Tentang Cagar Budaya dan Permuseuman		1	100.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA, Luar Daerah,				Pelatihan SDM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05.2.02 .02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	9 Objek	1.300.000.000			8 Buah	300.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehabitasi Bangunan Makan Awang Long Tenggarong		1	37.500.000	Tenggarong,				Rahab Bangunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Pembangunan Makan Mangkunegoro Tenggarong		1	37.500.000	Tenggarong,				Bangunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Tangga dan Semenisasi Halaman Tugu Pembantai Jepang Loa Kulu		1	37.500.000	Loa Kulu,				Bangunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Kayu dan Semenisasi Halaman Tugu Pembantai Jepang Loa Kulu		1	37.500.000	Loa Kulu,				Bangunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehabitasi Makan Sultan Aji Mahkota Anggana		1	37.500.000	Anggana,				Rehab Bangunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Pagar Kelililng Dan Pemasangan Paving Halaman Tugu Pembantaian Sanga-Sanga		1	37.500.000	Sanga Sanga,				Bangunan pagar dan paving	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Pagar Kelililng Dan Pemasangan Paving Halaman Tugu		1	37.500.000	Sanga Sanga,				Bangunan pagar dan paving	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Pembantaian Sanga-Sanga									
	Pembangunan Pagar Kelililng Dan Pemasangan Paving Halaman Rumah Penjara Sanga-Sanga		1	37.500.000	Sanga Sanga,				Bangunan pagar dan paving	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Revitalisasi Rumah Besar		1	1.000.000.000	Tenggarong,				Lanjutan Revitalisasi Cagar Budaya Rumah Besar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Prosentase museum yang dikelola	75.98 Persen	400.000.000			78.67 Persen	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan koleksi museum	2 Lokasi	400.000.000			2 Lokasi			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.06.2.01 .04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	200.000.000			2 Titik	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Keterangan	Perangkat Daerah
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
	Pengadaan Lemari Etalase Koleksi Museum Kayu Tuah Himbah Tenggarong		1	50.000.000	Tenggarong,				Pengadaan Etalase koleksi museum kayu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Rumah Adat Kutai Tuah Himbah Tenggarong		1	150.000.000	Tenggarong,				Bangunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.06.2.01 .05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	2 Unit	200.000.000			2 Bangunan/Gedung	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Peninggian dan Pengurukan Halaman Parkir Museum Kayu Tuah Himbah		2	200.000.000	Tenggarong,				Pengurukan halaman museum kayu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Total				1.486.242.054.327				1.001.134.418.440		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) PD merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, proses penyusunan RKPD Tahun 2025 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) PD menuangkan perencanaan strategis yang bersifat operasional dalam menterjemahkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Rencana Kerja (RENJA) PD nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi unit kerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun rencana kerja tahunan yang ditandai dengan dituangkannya lokasi, sasaran dan indikator kinerja out put dan out come dari setiap kegiatan. Perencanaan strategis ini mengedepankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel, sehingga peningkatan kinerja individu, unit kerja dan organisasi dapat tercapai. Akhirnya semoga Dokumen Rencana Kerja (Renja) PD ini dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan urusan pendidikan dan kebudayaan. Semoga Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini dapat menjadi salah satu panduan dalam mengarahkan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat memenuhi harapan masyarakat utamanya terhadap pelayanan kependidikan yang berkualitas. Dukungan penganggaran sangat diharapkan untuk pencapaian target yang telah ditentukan agar dapat terwujud.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rakhmat dan ampunanNya kepada kita semua. Amin.

i.RENJA DINAS KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan hal tersebut, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Dalam perkembangan pembangunan di bidang kesehatan yang mengikuti perubahan arah kebijakan baik di pusat dan daerah serta dinamika kondisi perekonomian dan keuangan daerah, perlu dilakukan penyesuian dalam pelaksanaanya. Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Kesehatan 2020-2024 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Kementerian Kesehatan dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) yang dilaksanakan pada tanggal 18-21 Februari 2020 dengan tema “Promotif Preventif Kesehatan untuk Membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul menuju Indonesia Maju 2045” mengangkat 5 permasalahan besar bidang kesehatan dalam agenda kerja yang harus segera dilaksanakan. Masalah kesehatan tersebut antara lain Angka Kematian Ibu dan

Angka Kematian Bayi (AKI-AKB), Pengendalian Stunting, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Tata Kelola Sistem Kesehatan yang di arahkan pada konteks pendekatan promotif dan preventif, yang membutuhkan dukungan dan inovasi serta pemanfaatan teknologi, sehingga pada bonus demografi mendatang Indonesia dapat memperoleh sumber daya yang unggul dan berdaya saing. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan transformasi sistem kesehatan. Kebijakan transformasi kesehatan tersebut merupakan upaya dalam menyukseskan tujuan pembangunan kesehatan. Terdapat 6 pilar transformasi kesehatan Indonesia, yang terdiri atas Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan. Penguatan pilar-pilar tersebut harus didukung beberapa landasan yang kuat salah satunya melalui pembiayaan kesehatan, jumlah dan distribusi tenaga kesehatan serta digitalisasi kesehatan dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Penguatan transformasi sistem kesehatan tentu akan berjalan maksimal jika didukung oleh dinas kesehatan di daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota termasuk jejaringnya.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor di masyarakat, sehingga dibutuhkan suatu perencanaan yang berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pembangunan nasional sebagaiamana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam rangka proses pembangunan di daerah, setiap tahunnya Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja tahunan perangkat daerah yang disebut Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dari hasil

penyusunan RKPD tersebut, menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebagai salah satu bentuk pengendalian dan evaluasi, dan menjadi satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah untuk menjamin konsistensi dan menilai capaian kinerja rencana pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026, yang diarahkan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada satu tahun anggaran berjalan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Melalui rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun untuk dapat mengoptimalkan sistem perencanaan pembangunan kesehatan agar selaras dan berkesinambungan, dan dapat dijadikan acuan yang berisi program dan kegiatan secara sistematis serta sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara secara terarah dan terukur.

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan beberapa landasan operasional, yaitu mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
19. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 52).

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud penyusunan dokumen Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai pedoman resmi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara selama satu tahun. Renja ini menyajikan acuan penentuan program kegiatan tahun 2025 yang telah dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan baik ditingkat kecamatan maupun kabupaten.

B. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah:

1. Menjabarkan tujuan pembangunan kedalam program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama Tahun 2025.
2. Menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan seluruh kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
3. Menciptakan kepastian dan sinergis perencanaan program kegiatan dan pelayanan kesehatan baik dasar maupun rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.
4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.

5. Menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review tentang Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Evaluasi pelaksanaan Renja ditentukan kepada hasil manfaat input dan output Dinas Kesehatan tahun 2023. Input yang dimaksud disini dibatasi pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output. Sementara itu input lain seperti SDM, bahan baku tidak dimasukan dalam evaluasi ini. Sedangkan yang dimaksud dengan output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan.

Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal; yaitu pencapaian (i) kinerja output dan (ii) kinerja keuangannya. Yang dimaksud dengan kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Menurunnya Angka Kematian Bayi
2. Menurunnya Angka Kematian Ibu
3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)
4. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Hal ini terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang melaksanakan pelayanan bidang kesehatan.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023, melaksanakan 5 Program, 22 Kegiatan dan 181 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp563.016.483.264,00 dengan realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp517.614.605.223,27 atau sebesar 91,94 %.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 dan pencapaian Renstra 2021-2026 secara keseluruhan diperlihatkan pada tabel TC-29 berikut:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.02 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah														
1.02 . 01 . 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
1.02 . 01 . 2.01 . 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	6	Dokumen	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.02 . 01 . 2.01 . 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Laporan	2	Laporan	100	2	Laporan	6	Laporan	60
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	Laporan			4	Laporan	4	Laporan	100	4	Laporan	8	Laporan	50
1.02 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
1.02 . 01 . 2.02 . 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	4600	Orang/bul	992	Org/bul	920	Orang/bu	898	Orang/bulan	98	920	Orang/bulan	2810	Orang/bulan	61

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Tunjangan ASN		an		an		lan								
1.02 . 01 . 2.02 . 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Laporan	6	Laporan	60
1.02 . 01 . 2.02 . 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	60	Laporan	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100	12	Laporan	28	Laporan	47

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		SKPD														
1.02 . 01 . 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
1.02 . 01 . 2.03 . 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	3	Laporan	60
1.02 . 01 . 2.03 . 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	80	Laporan	16	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	18	Laporan	23
1.02 . 01 . 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
1.02.01.2.05. 0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	"Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana	10	Unit	2	Unit						1	Unit	3	Unit	30

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Disiplin Pegawai"														
1.02.01.2.05. 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1500	stel			1	Paket	1	Paket	100		Paket	1	Paket	0
1.02.01.2.05. 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	"Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian"	60	Laporan	9	Laporan	2	Dokumen	2	Dokumen	100	12	Dokumen	23	Dokumen	38
1.02.01.2.05. 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	170	Unit	0	Unit	2	Dokumen	2	Dokumen	100	34	Dokumen	36	Dokumen	21
1.02.01.2.05. 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	"Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	170	Laporan	0	Laporan	2	Dokumen	2	Dokumen	100	34	Dokumen	36	Dokumen	21

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Pegawai"														
1.02.01.2.05. 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1000	Orang	329	Orang	100	Orang	266	Orang	266	300	Orang	895	Orang	90
1.02.01.2.05. 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250	Orang	0	Orang	50	Orang	50	Orang	100	64	Orang	114	Orang	46
1.02.01.2.05. 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	250	Orang	79	Orang	100	Orang	118	Orang	118	128	Orang	325	Orang	130

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.02 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													0		
1.02 . 01 . 2.06 . 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Jenis	9	Jenis	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	11	Paket	18
1.02 . 01 . 2.06 . 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Jenis	11	Jenis	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	13	Paket	22
1.02 . 01 . 2.06 . 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	74350	kotak/porsi	14870	kotak/porsi	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	14872	Paket	20
1.02 . 01 . 2.06 . 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	3	Paket	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		yang Disediakan														
1.02 . 01 . 2.06 . 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen								1	Dokumen	1	Dokumen	20
1.02 . 01 . 2.06 . 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4500	orang	907	orang	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	909	Laporan	20
1.02 . 01 . 2.06 . 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"	60	bulan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	36	Laporan	60
1.02 . 01 . 2.06 . 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	160	berkas	32	berkas	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	34	Dokumen	21
1.02 . 01 . 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah													0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
1.02 . 01 . 2.07 . 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	75	unit								0	Unit	0	Unit	0
1.02 . 01 . 2.07 . 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20	unit								0	Unit	0	Unit	0
1.02 . 01 . 2.07 . 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	paket								0	Unit	0	Unit	0
1.02 . 01 . 2.07 . 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	5	paket	1	paket	50	Unit	50	Unit	100	20	Unit	71	Unit	1420

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Disediakan														
1.02 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													0		
1.02 . 01 . 2.08 . 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Bulan	10	Bulan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	1	Laporan	12	Laporan	20
1.02 . 01 . 2.08 . 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Bulan	9	Bulan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	3	Laporan	13	Laporan	22
1.02 . 01 . 2.08 . 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Bulan	8	Bulan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	1	Laporan	10	Laporan	17
1.02 . 01 . 2.08 . 0004	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	60	Bula	8	Bula	2	Lap	2	Lapora	100,00	2	Lapora	12	Laporan	20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		n		n		ora n		n			n			
1.02 . 01 . 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													0		
1.02 . 01 . 2.09 . 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	475	unit	94	unit	95	unit	95	unit	100	95	Unit	284	Unit	60
1.02 . 01 . 2.09 . 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	475	unit	94	unit	11	unit	11	unit	100	106	Unit	211	Unit	44

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Lapangan	dan Perizinannya														
1.02 . 01 . 2.09 . 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	bulan	9	bulan	20	Unit	20	Unit	100	20	Unit	49	Unit	82
1.02 . 01 . 2.09 . 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	unit	3	unit	2	Unit	2	Unit	100	4	Unit	9	Unit	60
1.02 . 01 . 2.10 .	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan														
1.02 . 01 . 2.10 . 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	860123,3994	Jiwa	732684	Jiwa	32	Unit Kerja	32	Unit Kerja	100,00	32	Unit Kerja	732748	Unit Kerja	85

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Pelayanan Operasional BLUD Badak Baru				33307	Jiwa	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	100,00	1	Unit Kerja	33309	Unit Kerja	
	Pelayanan Operasional BLUD Handil Baru				45770	Jiwa	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	100,00	1	Unit Kerja	45772	Unit Kerja	
	Pelayanan Operasional BLUD puskesmas Jonggon jaya				13469	Jiwa	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	100,00	1	Unit Kerja	13471	Unit Kerja	
	Pelayanan Operasional BLUD puskesmas kahala				11433	Jiwa	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	100,00	1	Unit Kerja	11435	Unit Kerja	
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Kembang janggut				24571	Jiwa	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	100,00	1	Unit Kerja	24573	Unit Kerja	
	Pelayanan Operasional BLUD				35074	Jiwa	1	Unit	1	Unit Kerja	100,00	1	Unit Kerja	35076	Unit Kerja	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Puskesmas Kota Bangun							Kerja								
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Loa Duri				16985	Jiwa	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	100,00	1	Unit Kerja	16987	Unit Kerja	
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Loa Ipuh				17525	Jiwa	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	100,00	1	Unit Kerja	17527	Unit Kerja	
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Loa Kulu				29673	Jiwa	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	100,00	1	Unit Kerja	29675	Unit Kerja	
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Mangkurawang				27160	Jiwa	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	100,00	1	Unit Kerja	27162	Unit Kerja	
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Muara Jawa				42341	Jiwa	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	100,00	1	Unit Kerja	42343	Unit Kerja	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Muara Muntai				20466	Jiwa	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	100,00	1	Unit Kerja	20468	Unit Kerja	
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Perangat				36351	Jiwa	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	100,00	1	Unit Kerja	36353	Unit Kerja	
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Rapak Mahang				47791	Jiwa	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	100,00	1	Unit Kerja	47793	Unit Kerja	
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Rimba Ayu				18406	Jiwa	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	100,00	1	Unit Kerja	18408	Unit Kerja	
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Samboja				33241	Jiwa	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	100,00	1	Unit Kerja	33243	Unit Kerja	
	Pelayanan Operasional BLUD				14358	Jiwa	1	Unit	1	Unit Kerja	100,00	1	Unit Kerja	14360	Unit Kerja	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Puskesmas Sanga Sanga							Kerja								
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Sebulu II				1367 6	Jiwa	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	100,00	1	Unit Kerja	1367 8	Unit Kerja	
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Sungai Meriam				3197 3	Jiwa	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	100,00	1	Unit Kerja	3197 5	Unit Kerja	
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Teluk Dalam				5023 6	Jiwa	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	100,00	1	Unit Kerja	5023 8	Unit Kerja	
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Tabang				4746	Jiwa	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	100,00	1	Unit Kerja	4748	Unit Kerja	
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Ritan Baru				4268	Jiwa	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	100,00	1	Unit Kerja	4270	Unit Kerja	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Loa Janan				2360 2	Jiwa	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	100,00	1	Unit Kerja	2360 4	Unit Kerja	
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Muara Badak				1297 1	Jiwa	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	100,00	1	Unit Kerja	1297 3	Unit Kerja	
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Marang Kayu				1754 9	Jiwa	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	100,00	1	Unit Kerja	1755 1	Unit Kerja	
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Muara Kaman				7534	Jiwa	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	100,00	1	Unit Kerja	7536	Unit Kerja	
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Muara Wis				7272	Jiwa	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	100,00	1	Unit Kerja	7274	Unit Kerja	
	Pelayanan Operasional BLUD				1062 9	Jiwa	1	Unit	1	Unit Kerja	100,00	1	Unit Kerja	1063 1	Unit Kerja	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Batuah							Kerja								
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Sungai Merdeka				1513 2	Jiwa	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	100,00	1	Unit Kerja	1513 4	Unit Kerja	
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Sebulu I				3048 8	Jiwa	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	100,00	1	Unit Kerja	3049 0	Unit Kerja	
	Pelayanan Operasional BLUD puskesmas Bunga Jadi				1542 5	Jiwa	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	100,00	1	Unit Kerja	1542 7	Unit Kerja	
	Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Separi III				1926 2	Jiwa	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	100,00	1	Unit Kerja	1926 4	Unit Kerja	
1.02 . 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Presentasi Balita Stunting														

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
		Indeks Keluarga sehat														
		Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi														
		Indeks Pelayanan kesehatan balita														
		Indeks Pelayanan Penyakit menular														
		Indeks Pelayanan penyakit tidak menular														
		Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan														
		Indeks Pelayanan Kesehatan Primer														
		Indeks Perilaku kesehatan														
		Persentase														

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama														
1.02 . 02 . 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota															
1.02 . 02 . 2.01 . 0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	dokumen DED Rumah Sakit	1	unit	1	Dokumen	0	Unit	0	Unit	0	0	Unit	1	Unit	100
1.02 . 02 . 2.01 . 0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dibangun	6	unit	4	Unit	8	Unit	8	Unit	100	8	Unit	20	Unit	333
1.02 . 02 . 2.01 . 0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun	42	unit	57	Unit	8	Unit	8	Unit	100	8	Unit	73	Unit	174
1.02 . 02 . 2.01 . 0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga	Jumlah rumah dinas tenaga	6	unit	8	unit	3	Unit	6	Unit	200	3	Unit	17	Unit	283

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Kesehatan	kesehatan yang dibangun														
1.02 . 02 . 2.01 . 0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	8				0	Unit	0	Unit	0,0	0	Unit	0	Unit	
1.02 . 02 . 2.01 . 0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang direhab dan dipelihara	29	unit	22	unit	19	Unit	21	Unit	111	19	Unit	62	Unit	214
1.02 . 02 . 2.01 . 0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas pembantu yang direhab dan dipelihara	35	unit	24	unit	15	Unit	13	Unit	87	15	Unit	52	Unit	149
1.02 . 02 . 2.01 . 0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas	12				4	Unit	8	Unit	200	4	Unit	12	Unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Kesehatan	Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan														
1.02 . 02 . 2.01 . 0012	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana yang diadakan (Mobil ambulance, meabulair, Ipal, SAP)	58	unit	85	unit	73	Unit	31	Unit	42	73	Unit	189	Unit	326
1.02 . 02 . 2.01 . 0013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana yang diadakan untuk Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	56	unit	20	Paket	2525	Unit	2228	Unit	88	2525	Unit	4773	Unit	8523
1.02 . 02 . 2.01 . 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik yang diadakan	33	Paket	2	Paket	10	Unit	10	Unit	100	10	Unit	22	Unit	67
1.02 . 02 . 2.01 . 0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat	Jumlah alat kalibrasi yang	5	Paket	10	Paket	0	Unit	0	Unit	0	0	Unit	10	Unit	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Kalibrasi	diadakan dan dipelihara														
1.02 . 02 . 2.01 . 0016	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang diadakan	1400	Paket	2	Paket	5	Paket	5	Paket	100	5	Paket	12	Paket	1
1.02 . 02 . 2.01 . 0017	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumalh BHP yang diadakan	1000	Paket	2	Paket	8	Paket	8	Paket	100	8	Paket	18	Paket	2
1.02 . 02 . 2.01 . 0018	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana yang diadakan untuk Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	24	Paket	26	Paket	0	Unit	0	Unit	0	0	Unit	26	Unit	108
1.02 . 02 . 2.01 . 0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik yang dipelihara	1	Paket	7	Paket	350	Unit	342	Unit	98	350	Unit	699	Unit	69900
1.02 . 02 . 2.01 . 0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin,	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis										10	Paket	10	Paket	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)				Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan													
1.02 . 02 . 2.01 . 0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas										165354	Keluarga	165354	Keluarga	
1.02 . 02 . 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di													

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		fasilitas kesehatan														
		Persentase KB Aktif														
		Imunisasi Dasar lengkap (IDL)														
1.02 . 02 . 2.02 . 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	Persen	94	Persen	13942	Orang	12732	Orang	91,32	13723	Orang	26549	Orang	
1.02 . 02 . 2.02 . 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	Persen	68	Persen	12801	Orang	12215	Orang	95,42	13101	Orang	25384	Orang	
1.02 . 02 . 2.02 . 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan	100	Persen	78	Persen	12674	Orang	8942	Orang	70,55	12477	Orang	21497	Orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar														
1.02 . 02 . 2.02 . 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	Persen	78	Persen	67775	Orang	54509	Orang	80,43	60339	Orang	114926	Orang	
1.02 . 02 . 2.02 . 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	Persen	76	Persen	141015	Orang	271952	Orang	192,85	139267	Orang	411295	Orang	
1.02 . 02 . 2.02 . 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan	100	Persen	112	Persen	506653	Orang	507639	Orang	100,19	488840	Orang	996591	Orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Kesehatan Sesuai Standar														
1.02 . 02 . 2.02 . 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	Persen	96	Persen	49970	Orang	48721	Orang	97,50	48399	Orang	97216	Orang	
1.02 . 02 . 2.02 . 0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	Persen	83	Persen	56849	Orang	56849	Orang	100,00	54636	Orang	111568	Orang	
1.02 . 02 . 2.02 . 0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan	100	Persen	84	Persen	16315	Orang	24003	Orang	147,12	15682	Orang	39769	Orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar														
1.02 . 02 . 2.02 . 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100	Persen	62	Persen	856	Orang	835	Orang	97,55	829	Orang	1726	Orang	
1.02 . 02 . 2.02 . 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	Persen	86	Persen	9851	Orang	10397	Orang	105,54	5811	Orang	16294	Orang	
1.02 . 02 . 2.02 . 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang	100	Persen	85	Persen	17295	Orang	17468	Orang	101,00	16254	Orang	33807	Orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar														
1.02 . 02 . 2.02 . 0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	Persen	50,31	Persen	4	Dokumen	5	Dokumen	125,00	32	Dokumen	87,31	Dokumen	
1.02 . 02 . 2.02 . 0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai	100	Persen	50,9	Persen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	32	Dokumen	83,9	Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Standar														
1.02 . 02 . 2.02 . 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	Persen	122	orang	17	Dokumen	17	Dokumen	100,00	7	Dokumen	146	Dokumen	
1.02 . 02 . 2.02 . 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	65	Persen	16	Persen	5	Dokumen	5	Dokumen	100,00	4	Dokumen	25	Dokumen	
1.02 . 02 . 2.02 . 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	74	Desa/Kelurahan	12	Desa/Kelurahan	6	Dokumen	6	Dokumen	100,00	6	Dokumen	24	Dokumen	
1.02 . 02 . 2.02 . 0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	160	Orang	29	Orang	32	Dokumen	32	Dokumen	100,00	1	Dokumen	62	Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya														
1.02 . 02 . 2.02 . 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	95	persen	559,3	persen	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	1	Dokumen	564,3	Dokumen	
1.02 . 02 . 2.02 . 0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	160	puskesmas	24	puskesmas	10	Dokumen	10	Dokumen	100,00	0	Dokumen	34	Dokumen	
1.02 . 02 . 2.02 . 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	100	persen	31,5	persen	10	Dokumen	10	Dokumen	100,00	10	Dokumen	51,5	Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		dan Tidak Menular														
1.02 . 02 . 2.02 . 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	500 000	peserta	90000	peserta	42	Dokumen	42	Dokumen	100,00	42	Dokumen	90084	Dokumen	
1.02 . 02 . 2.02 . 0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	100	persen	23	persen	20	Paket	20	Paket	100,00	64	Paket	107	Paket	
1.02 . 02 . 2.02 . 0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	18	Kecamatan	0	Kecamatan	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	1	Dokumen	2	Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Kabupaten/Kota Sehat														
1.02 . 02 . 2.02 . 0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		16	unit	16	unit					0,00	96	Dokumen	112	Dokumen	
1.02 . 02 . 2.02 . 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	160	Puskesmas	32	Puskesmas	96	Dokumen	96	Dokumen	100,00	96	Dokumen	224	Dokumen	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Badak Baru	Jumlah Operasional Layanan Puskesmas					3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	3	Dokumen	6	Dokumen	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Batuah	Jumlah Operasional Layanan Puskesmas					3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	3	Dokumen	6	Dokumen	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Bunga Jadi	Jumlah Operasional Layanan					3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	3	Dokumen	6	Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Puskesmas														
	Operasional Pelayanan Puskesmas Handil Baru	Jumlah Operasional Layanan Puskesmas					3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	3	Dokumen	6	Dokumen	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Jonggon Jaya	Jumlah Operasional Layanan Puskesmas					3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	3	Dokumen	6	Dokumen	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Kahala	Jumlah Operasional Layanan Puskesmas					3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	3	Dokumen	6	Dokumen	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Kembang Janggut	Jumlah Operasional Layanan Puskesmas					3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	3	Dokumen	6	Dokumen	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Kota Bangun	Jumlah Operasional Layanan Puskesmas					3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	3	Dokumen	6	Dokumen	
	Operasional	Jumlah					3	Dok	3	Dokum	100,00	3	Dokum	6	Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Pelayanan Puskesmas Loa Duri	Operasional Layanan Puskesmas						um en		en			en			
	Operasional Pelayanan Puskesmas Loa Ipuh	Jumlah Operasional Layanan Puskesmas					3	Dok um en	3	Dokum en	100,00	3	Dokum en	6	Dokumen	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Loa Janan	Jumlah Operasional Layanan Puskesmas					3	Dok um en	3	Dokum en	100,00	3	Dokum en	6	Dokumen	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Loa Kulu	Jumlah Operasional Layanan Puskesmas					3	Dok um en	3	Dokum en	100,00	3	Dokum en	6	Dokumen	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Mangkurawang	Jumlah Operasional Layanan Puskesmas					3	Dok um en	3	Dokum en	100,00	3	Dokum en	6	Dokumen	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Marangkayu	Jumlah Operasional Layanan					3	Dok um en	3	Dokum en	100,00	3	Dokum en	6	Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Puskesmas														
	Operasional Pelayanan Puskesmas Muara Badak	Jumlah Operasional Layanan Puskesmas					3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	3	Dokumen	6	Dokumen	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Muara Jawa	Jumlah Operasional Layanan Puskesmas					3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	3	Dokumen	6	Dokumen	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Muara Kaman	Jumlah Operasional Layanan Puskesmas					3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	3	Dokumen	6	Dokumen	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Muara Muntai	Jumlah Operasional Layanan Puskesmas					3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	3	Dokumen	6	Dokumen	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Muara Wis	Jumlah Operasional Layanan Puskesmas					3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	3	Dokumen	6	Dokumen	
	Operasional	Jumlah					3	Dok	3	Dokum	100,00	3	Dokum	6	Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Pelayanan Puskesmas Perangat	Operasional Layanan Puskesmas						um en		en			en			
	Operasional Pelayanan Puskesmas Rapak Mahang	Jumlah Operasional Layanan Puskesmas					3	Dok um en	3	Dokum en	100,00	3	Dokum en	6	Dokumen	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Rimba Ayu	Jumlah Operasional Layanan Puskesmas					3	Dok um en	3	Dokum en	100,00	3	Dokum en	6	Dokumen	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Ritan Baru	Jumlah Operasional Layanan Puskesmas					3	Dok um en	3	Dokum en	100,00	3	Dokum en	6	Dokumen	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Samboja	Jumlah Operasional Layanan Puskesmas					3	Dok um en	3	Dokum en	100,00	3	Dokum en	6	Dokumen	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Sanga-sanga	Jumlah Operasional Layanan					3	Dok um en	3	Dokum en	100,00	3	Dokum en	6	Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Puskesmas														
	Operasional Pelayanan Puskesmas Sebulu I	Jumlah Operasional Layanan Puskesmas					3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	3	Dokumen	6	Dokumen	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Sebulu II	Jumlah Operasional Layanan Puskesmas					3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	3	Dokumen	6	Dokumen	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Separi 3	Jumlah Operasional Layanan Puskesmas					3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	3	Dokumen	6	Dokumen	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Merdeka	Jumlah Operasional Layanan Puskesmas					3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	3	Dokumen	6	Dokumen	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Meriam	Jumlah Operasional Layanan Puskesmas					3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	3	Dokumen	6	Dokumen	
	Operasional	Jumlah					3	Dok	3	Dokum	100,00	3	Dokum	6	Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Pelayanan Puskesmas Tabang	Operasional Layanan Puskesmas						um en		en			en			
	Operasional Pelayanan Puskesmas Teluk Dalam	Jumlah Operasional Layanan Puskesmas					3	Dok um en	3	Dokum en	100,00	3	Dokum en	6	Dokumen	
1.02 . 02 . 2.02 . 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10	Fask es Lain nya	2	Fask es Lain nya	2	Dok um en	2	Dokum en	100,00	2	Dokum en	6	Dokumen	60
1.02 . 02 . 2.02 . 0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten /Kota	100	pers en	8	Pusk esma s	32	Pus kes ma s	32	Puskes mas	100,00	32	Puskes mas	72	Puskesma s	72
1.02 . 02 . 2.02 . 0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan,										1	unit	1	unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	(SPGDT)	Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
1.02 . 02 . 2.02 . 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					100	Orang	100	Orang	100,00	1020	Orang	1120	Orang	
1.02 . 02 . 2.02 . 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					25	Orang	25	Orang	100,00	288	Orang	313	Orang	
1.02 . 02 . 2.02 . 0042	Pengelolaan	Jumlah Dokumen					1	Dok	1	Dokum	100,00	1	Dokum	2	Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	pelayanan kesehatan Malaria	pelayanan Kesehatan pada penderita Malaria						um en		en			en			
1.02 . 02 . 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi															
1.02 . 02 . 2.03 . 0001	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	15	dok ume n	3	dokumen	0	Dok um en	0	Dokum en	0,00	0	Dokum en	3	Dokumen	20
1.02 . 02 . 2.03 . 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	180	Pus kes mas	21	Pusk esma s	3	Dok um en	21	Dokum en	700,00	9	Dokum en	51	Dokumen	28
1.02 . 02 . 2.03 . 0003	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan	5	pake t	1	Pusk esma s	0	Uni t	0	Unit	0,00	0	Unit	1	Unit	20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Jaringan Internet yang Disediakan														
1.02 . 02 . 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
1.02 . 02 . 2.04 . 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Persentase Fasilitas kesehatan yang memiliki sertifikat izin	500	Persen	1170	Izin	225	Unit	136	Unit	60,44	125	Unit	1431	Unit	286
1.02 . 02 . 2.04 . 0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan										1	Unit	1	Unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Kabupaten/Kota	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar														
1.02 . 02 . 2.04 . 0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang dilakukan Pemantauan dan Pelaporan	175	faskes	35	faskes	21	Dokumen	18	Dokumen	85,71	21	Dokumen	74	Dokumen	42
1.02 . 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA															
1.02 . 03 . 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota															
1.02 . 03 . 2.01 . 0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan	175	Puskes	10	Puskesm	150	Dokum	246	Dokumen	164,00	1200	Dokumen	1456	Dokumen	832

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		mas dan RS		as dan RS		en								
1.02 . 03 . 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota															
1.02 . 03 . 2.02 . 0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	220	orang	35	orang	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	1	Dokumen	38	Dokumen	17

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	220	orang			30	Orang	67	Orang		44	Orang	111	Orang	
1.02 . 03 . 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
1.02 . 03 . 2.03 . 0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan	550	orang	26	orang	250	Orang	421	Orang	168,40	150	Orang	597	Orang	109

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Kabupaten/Kota	Mutu dan Kompetensinya														
1.02 . 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI,ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN															
1.02 . 04 . 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)															
1.02 . 04 . 2.01 . 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal,	80	Persen	4	Persen	50	Dokumen	50	Dokumen	0,00	60	Dokumen	114	Dokumen	143

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
1.02 . 04 . 2.01 . 0002	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisonal (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	1	dokumen	0	dokumen		Sarana		Sarana		0	Sarana	0	Sarana	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		(UMOT)														
1.02 . 04 . 2.01 . 0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	40	Persen	7	Persen	50	Sarana	50	Sarana	100,00	0	Sarana	57	Sarana	143
1.02 . 04 . 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga															

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.02 . 04 . 2.03 . 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	60	Persen	5	Persen	50	Dokumen	50	Dokumen	100,00	80	Dokumen	135	Dokumen	225
1.02 . 04 . 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post															

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga															
1.02 . 04 . 2.06 . 0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	40	Persen	3	Persen	50	Unit	50	Unit	100,00	50	Unit	103	Unit	258
1.02.04.2.06.0002	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam	1	Dokumen				Dokumen		Dokumen		0	Dokumen	0	Dokumen	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Tangga	rangka Tindak Lanjut Pengawasan														
1.02 . 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN															
1.02 . 05 . 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
1.02 . 05 . 2.01 . 0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pertemuan Puskesmas	10	kali	7	kali	5	Dokumen	5	Dokumen	100,00	4	Dokumen	16	Dokumen	160
1.02 . 05 . 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka															

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Hasil Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan(2024)		
							Target Renja-PD Tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
1.02 . 05 . 2.02 . 0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Jenis Media Promosi	55	Media	22	Media	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	2	Dokumen	26	Dokumen	47
1.02 . 05 . 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
1.02 . 05 . 2.03 . 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Bimtek dan Supervisi UKBM di Puskesmas	32	Puskesmas	24	Puskesmas	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	4	Dokumen	32	Dokumen	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran pencapaian sasaran pembangunan kesehatan diukur dengan menggunakan indikator-indikator pembangunan kesehatan yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta penggunaan anggaran.

2.2.1. Pencapaian IKU Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara ada 4 indikator, yaitu Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pencapaian IKU Dinas Kesehatan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2. 1.
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
1	Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup)	Angka	13	11
2	Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Angka	208	96
3	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	Persen	0,66	0,75
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	82.5	82,6

Dari tabel pencapain IKU diatas bahwa semua target yang direncanakan sudah mencapai target ditetapkan.

a. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesehatan ibu dan anak. Semakin rendah angka kematian bayi di suatu wilayah mengindikasikan semakin baiknya program kesehatan mereka.

Gambar 2.1

Grafik Jumlah Kematian Bayi tahun 2018-2021

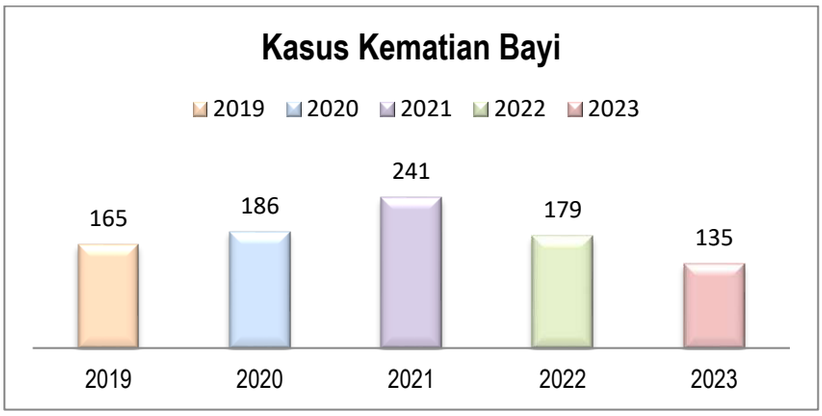

Dilihat dari grafik diatas terlihat bahwa jumlah kematian bayi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terjadi penurunan kasus kematian bayi.

Beberapa faktor pendukung menurunya angka kematian bayi adalah sebagai berikut :

1. Adanya sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Pendanaan yang memadai terkait penurunan angka kematian bayi
3. Peningkatan Kapasitas Dokter Umum Puskesmas
4. Duckling Bidan
5. Di Dukung Oleh SK AMP Dan Pelaksanaan AMP Pada Setiap Kasus Kematian
6. Pelayanan Dokter Spesialis Anak dan Spesialis Obgyn ke Kecamatan secara berkala
7. Duck And Duckling Anak Terfokus.
8. Pelayanan Bersalin Dan Pelayanan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar.
9. Sistem Rujukan Berjalan Baik (Hotline Dan Logbook Rujukan).
10. Feedback Rujukan Neonatal.
11. Pengadaan Alat Resusitasi bagi Puskesmas
12. AMP-SR Tingkat Puskesmas dan Triwulan Kabupaten.

Selain faktor pendukung ada pula faktor penghambat dalam mencapai target penurunan angka kematian yaitu:

1. Kondisi Geografis susah untuk Mencapai Akses Kesehatan.
2. Kapasitas dan keterlibatan Dokter Umum dalam pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir tidak maksimal.
3. Kapasitas dan Fasilitas RSUD Kurang untuk menangani bayi Kecil (BBLR dan Prematur) terkait NICU, obat dan alat.
4. Tim PONED atau Tim bersalin Puskesmas tidak kompeten resusitasi Bayi Baru Lahir.
5. Respon Hotline Lambat dengan berbagai alasan (jaringan, respon dokter DPJP).

b. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu target global Sustainable Development Goals (SDGs) dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) menjadi 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Tahun 2023 jumlah kematian ibu di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebanyak 24 orang, dengan angka kematian Ibu sebesar 96 per 100.000 kelahiran hidup.

Gambar 2.2

Grafik Jumlah Kematian Ibu tahun 2019-2023

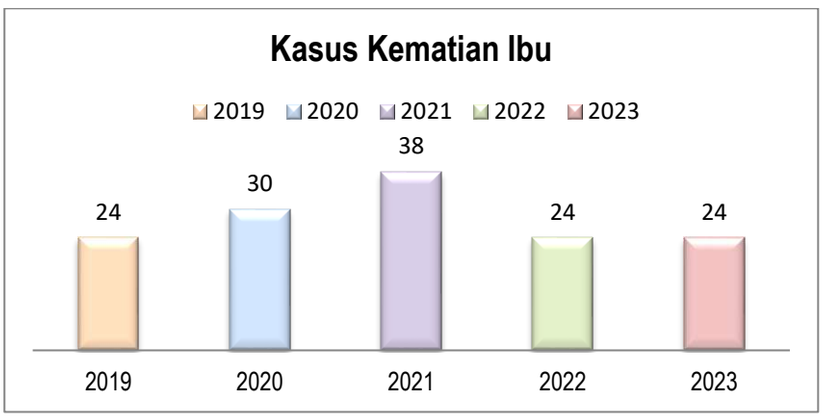

Dibandingkan dengan target Angka Kematian ibu Tahun 2023 yang seberar 208 per 100.000 kelahiran hidup. Capaian Angka Kematian ibu tahun 2023 jauh dibawah target yang di tetapkan, Hal ini dapat disimpulkan bahwa sudah terjadi penurunan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun faktor pendukung menurunnya angka kematian ibu adalah sebagai berikut :

1. Adanya sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Di Dukung Oleh SK AMP Dan Pelaksanaan AMP Pada Setiap Kasus Kematian
3. Pelayanan Dokter Spesialis Kebidanan,
4. Duck And Duckling Maternal Terfokus.
5. Skrining Ibu Hamil (Srikandie Dan Indeks Rujukan)
6. Pelayanan Bersalin Sesuai Dan Pelayanan Nifas Sesuai Standar.
7. Sistem Rujukan Berjalan Baik (Hotline Dan Logbook Rujukan).
8. Feedback Rujukan.
9. Pelatihan Blended Learning Dokter Umum
10. Pelatihan Gadar Matneo
11. Pendanaan / Anggaran yang mencukupi.

Selain faktor pendukung, ada pula faktgor penghambat yang mempengaruhi penurunan Angka Kematian Ibu yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis Susah Untuk Mencapai Akses Kesehatan.
2. Kapasitas dan keterlibatan Dokter Umum dalam pelayanan kebidanan tidak maksimal
3. Tidak ada Dokter Obgyn di RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
4. Respon Hotline Lambat dengan berbagai alasan (jaringan, respon dokter DPJP)

c. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)

Dalam menentukan peringkat kabupaten/kota dalam pembangunan kesehatan disusunlah Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) yaitu indikator komposit yang menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan. Ada 24 indikator kesehatan yang digunakan dalam IPKM dengan nilai korelasi UHH yang tertinggi. Indikator kesehatan tersebut adalah prevalensi balita gizi buruk dan kurang, prevalensi balita sangat pendek dan pendek, prevalensi balita sangat kurus dan kurus, prevalensi balita gemuk, prevalensi diare, prevalensi pnemonia, prevalensi hipertensi, prevalensi gangguan mental,

prevalensi asma, prevalensi penyakit gigi dan mulut, prevalensi disabilitas, prevalensi cedera, prevalensi penyakit sendi, prevalensi ISPA, proporsi perilaku cuci tangan, proporsi merokok tiap hari, akses air bersih, akses sanitasi, cakupan persalinan oleh nakes, cakupan pemeriksaan neonatal-1, cakupan imunisasi lengkap, cakupan penimbangan balita, ratio Dokter/Puskesmas, dan ratio bidan/desa.

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 sebesar 0,65 persen, yang telah melampiau target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara yaitu sebesar 0,66. Keberhasilan pencapaian Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Kabupaten Kutai Kartanegara tidak lepas dari dukungan komitmen dan integritas manajemen dan penyelenggara kegiatan, selain itu adanya sinkronisasi data dan kolekting data yang sudah semakin baik, serta akses dan mutu pelayanan kesehatan semakin meningkat. Selain faktor pendukung ada pula faktor penghambat dalam pencapaian indeks pembanguanan kesehatan masyarakat (IPKM). Dimana kualitas dan ketertiban penginputan data dan bahan yang masih kurang, sehingga mempengaruhi kualitas data yang diperoleh untuk menghasilkan nilai IPKM.

d. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Selain itu, data IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara

pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan publik selanjutnya.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 82,6 persen, hal ini telah melebihi target yang telah di tetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara yang hanya sebesar 82.5 persen. Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini tidak terlepas dari peran serta fasilitas kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana seluruh puskesmas telah terakreditasi. melakukan survey kepuasan untuk mengukur kualitas pelayanan publik dan sekaligus menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu jaringan internet yang kadang lambat sehingga mengganggu proses pelayanan, waktu pelayanan menjadi lebih lama.

Tabel 2. 2.

Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2023

SUMBER DANA	ALOKASI	REALISASI	%
BLUD	44.489.455.714,00	39.702.770.278,00	89,24
DAK	69.556.627.794,00	55.035.208.980,00	79,12
APBD	448.970.399.756,00	422.876.625.965,27	94,18
Total	563.016.483.264,00	517.614.605.223,27	91,94

Dilihat dari realisasi anggaran yang dikelola Dinas Kesehatan masih masuk katagori baik. Dana yang bersumber dari APBN berupa Dana Alokasi Khusus terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Realisasi keuangan untuk DAK Non Fisik tahun 2023 sebesar 76,02% sedangkan realisasi keuangan untuk DAK Fisik sebesar 97,92% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan pencapaian kinerja keuangan yang bersumber dana APBD sudah termasuk belanja

langsung dan belanja tidak langsung dengan realisasi baik dengan 94,18%. Sumber dana BLUD Alokasi anggaran adalah realisasi pendapatan BLUD tahun 2023 sebesar 89,24 %.

2.2.2. Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kinerja bidang kesehatan ditandai juga melalui indikator SPM sesuai Permenkes Nomor 4 Tahun 2019. Sebanyak 12 indikator dalam SPM, melingkupi pelayanan kesehatan dalam daur kehidupan (continuum of care) dan penanggulangan penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Hasil capaian indikator SPM seperti terinci pada tabel TC-30 berikut ini :

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator*)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	SPM												
1	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	91,96%	91,36%	100 %	100 %	
2	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	94,53%	95,46%	100 %	100 %	
3	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	97,24%	93,13%	100 %	100 %	
4	Persentase Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	84,39%	87,66%	100 %	100 %	
5	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	99,01%	100 %	100 %	
6	Persentase Orang Usia 15 - 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	91,94%	94,24%	100 %	100 %	
7	Persentase sasaran usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	90,59%	90,24%	100 %	100 %	
8	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100,00%	100 %	100 %	

NO	Indikator*)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Sesuai Standar												
9	Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100,00%	100 %	100 %	
10	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,84%	100,00%	100 %	100 %	
11	Presentase orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	138,38%	100,00%	100 %	100 %	
12	Persentase Orang dengan Risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	108,98%	100,00%	100 %	100 %	
	IKU												
1	Menurunnya Angka Kematian Bayi			13	13	13	12	12	13	11			
2	Menurunnya Angka Kematian Ibu			215	208	201	193	196	187	96			
3	Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)			0,64	0,66	0,68	0,70	0,72	0,64	0,75			
4	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			80	82,5	85	87,5	90	82,8	82,6			
	IKK												
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk								0,16%	1,07%			
2	Persentase RS Rujukan Tingkat								100,00%	100%			

NO	Indikator*)	SPM/ standar nasional	IKK		Target Renstra-PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kabupaten/Kota yang terakreditasi												
3	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar								91,96%	91,36%			
4	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar								94,53%	95,46%			
5	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar								97,24%	93,13%			
6	Persentase Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar								84,39%	87,66%			
7	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar								100,00%	99,01%			
8	Persentase Orang Usia 15 - 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar								91,94%	94,24%			
9	Persentase sasaran usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar								90,59%	90,24%			
10	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan								100,00%	100,00%			

NO	Indikator*)	SPM/ standar nasional	IKK		Target Renstra-PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Sesuai Standar												
11	Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar								100,00%	100,00%			
12	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar								100,84%	100,00%			
13	Presentase orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar								138,38%	100,00%			
14	Persentase Orang dengan Risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar								108,98%	100,00%			

2.2.3. Beberapa Faktor penghambat upaya pencapaian kinerja

a. Kondisi geografis sehingga menghambat masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan
b. Masih kurangnya ketersediaan SDM Kesehatan tertentu sehingga upaya pencapaian program dan SPM belum bias berjalan optimal. Selain ketersediaan SDM, kompetensi SDM yang adapun masih kurang khususnya petugas Pusban / Polindes
c. Intergrasi antar lintas sektor, antar lintas program dan jaringannya dan jejaring belum berjalan maksimal.
d. Jumlah sasaran yang besar serta tingginya target yang harus dicapai belum sebanding dengan sumber daya yang tersedia.
e. Keterlibatan stakeholder dan lintas sektor belum berjalan secara maksimal dalam pelaksanaan program kesehatan.
f. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dalam menunjang penyelenggaraan layanan kesehatan yang bermutu dan terdigitalisasi..
g. Belum optimalnya advokasi dan sosialisasi pada stakeholder dan lintas sekto terhadap pelaksanaan SPM, yang menjadi tanggung jawab bersama mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah dalam upaya pencapaiannya.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap berbagai kondisi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara maka beberapa isu penting yang hendaknya mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan upaya ketersediaan pelayanan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem penjaminan pelayanan kesehatan yang mencakup seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada saat ini sudah dilaksanakan melalui program Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat.
2. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.
3. Perlunya peningkatan upaya promotif dan preventif kesehatan yang lebih maksimal dalam upaya mencegah agar masyarakat tidak mengalami kesakitan, karena upaya pengobatan penyakit akan membutuhkan dana yang sangat tinggi.

4. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih baik sehingga mutu pelayanan kesehatan dan cakupan pelayanan kesehatan dapat lebih ditingkatkan secara lebih baik.
5. Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti : penduduk miskin, lansia, dan masyarakat marginal lainnya.
6. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh, terutama stunting.
7. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta pendistribusian sumber daya manusia kesehatan, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan.
8. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi pengelolaan administrasi kesehatan.
9. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan, program, dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi Lintas Sektor.
10. Disparitas antar wilayah, golongan pendapatan, dan urban-rural masih terjadi dan belum terjadi perbaikan secara signifikan. Sehingga perlu pendekatan pembangunan sesuai kondisi wilayah.
11. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal, termasuk pembudayaan Germas.
12. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dalam lingkungan yang sehat dan berPHBS.
13. Belum optimalnya pendataan kesehatan yang cepat, akurat dan valid yang berakibat terlambatnya penetapan kebijakan dan intervensi, untuk menunjang Program Indonesia Sehat dan pendekatan Keluarga (PIS-PK)
14. Ketersediaan aset berupa lahan / tanah untuk pengembangan bangunan sarana kesehatan yang terbatas.
15. Pengaturan terhadap sarana pelayanan kesehatan swasta belum baik.
16. Sistem informasi kesehatan belum terintegrasi secara menyeluruh.

2.4. Review tentang Rancangan Awal RKPD

Dengan memperhatikan rancangan awal RKPD yang ada dengan kebutuhan yang diperlukan, terlihat bahwa masih sejalan dengan program, kegiatan dan target yang ingin dicapai, secara program sudah mengakomodir semua program namun secara kegiatan perlu adanya pemecahan atau penambahan sub kegiatan sehingga target output bisa lebih terukur.

Tabel T-C.31.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Kutai Kartanegara	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80 Nilai	198.059.403.116	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Kutai Kartanegara	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80 Nilai	431.432.747.746	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.200.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.500.000.000	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	500.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	750.000.000	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kab. Kutai Kartane	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	2 Dokumen	350.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kab. Kutai Kartane	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	3 Laporan	250.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	gara	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	gara	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	350.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	150.000.000	
1.02.01.2.01.08						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
1.02.01.2.01.09						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik	Kab. Kutai Kartane	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah	1 Data	250.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Sektoral Daerah	gara	Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			
1.02.01.2.01.10						Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah BerdasarkanBidang Urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	4 laporan	101.066.160.586	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	4 laporan	347.946.998.746	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	920 Orang/Bulan	99.506.512.446	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2520 Orang /bulan	346.587.350.606	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Tunjangan ASN								
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	450.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	250.000.000	
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	1.109.648.140	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1.109.648.140	
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik	Kab. Kutai	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	250.000.00	Administrasi Barang Milik	Kab. Kutai	Jumlah Dokumen Barang Milik	2 Dokumen	100.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah pada Perangkat Daerah	Kartanegara	Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		0	Daerah pada Perangkat Daerah	Kartanegara	Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	50.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100.000.000	
1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 laporan	200.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	-	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	2.100.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	1.050.000.000	
1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana	2 unit	100.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana	4 Unit	100.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pegawai		Disiplin Pegawai			Pegawai		Disiplin Pegawai			
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Stel	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Laporan	200.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	200.000.000	
1.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	34 unit	200.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	200.000.000	
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	34 laporan	200.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	200.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200 orang	800.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	100.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64 Orang	100.000.000	
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	500.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64 Orang	250.000.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat	8 layanan	2.760.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 layanan	2.060.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Daerah								
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Jenis	100.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Jenis	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14870 1. Jenis 2. Porsi 3. Kotak	200.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 1. Buku 2. Lembar 3.Bu	350.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	350.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ah							
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	250 1. Eksemplar 2. Buku 3. Kali	50.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	250 Dokumen	50.000.000	
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	900 Orang/kali	50.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Orang/kali	1.500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	800.000.000	
1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	32 Berkas	310.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	310.000.000	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Kutai Kartane	Jumlah barang milik daerah penunjang	22 unit	1.425.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Kutai Kartane	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan	22 unit	475.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	gara	urusan pemerintahan yang diadakan			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	gara	pemerintahan yang diadakan			
1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	15 unit	150.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-	
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	400.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	400.000.000	
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	75.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	75.000.000	
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1 paket	800.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	0 Unit	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bangunan Lainnya		Lainnya yang Disediakan			Bangunan Lainnya		Lainnya yang Disediakan			
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	33.655.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	32.055.000.000	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	3.500.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3.000.000.000	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	12 bulan	150.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	1 Laporan	150.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kantor		Kantor yang Disediakan			Kantor		Kantor yang Disediakan			
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	30.000.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	28.900.000.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Barang Milik Daerah	95 Unit	1.245.749.000	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Barang Milik Daerah	95 Unit	1.245.749.000	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	95 unit	250.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	250.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	95 Unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	150.000.000	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan	200.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	200.000.000	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	645.749.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	645.749.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya	30 Puskesmas	54.357.493.530	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nilai	30 Puskesmas	45.000.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			mendapatkan nilai AA					AA			
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	32 Unit Kerja	54.357.493.530	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	32 Unit Kerja	45.000.000.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Badak Baru	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.589.525.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Badak Baru	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.250.000.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Batuah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.252.081.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Batuah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.100.000.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Bunga Jadi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.377.707.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Bunga Jadi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.048.011.675	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Handil Baru	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.027.751.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Handil Baru	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.450.000.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Jonggon Jaya	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.104.069.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Jonggon Jaya	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	820.000.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Kahala	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.284.143.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Kahala	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	896.562.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kembang Janggut	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.962.461.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kembang Janggut	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.100.000.000	
	Pelayanan dan Penunjang	Puskesmas	Jumlah BLUD yang	1 Unit Kerja	1.993.581.0	Pelayanan dan Penunjang	Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	1.800.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan BLUD	Kota Bangun	Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		00	Pelayanan BLUD	Kota Bangun	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Loa Duri	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.733.864.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Loa Duri	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.400.000.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Loa Ipuh	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.863.413.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Loa Ipuh	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.900.000.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Loa Janan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.982.909.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Loa Janan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.700.000.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Loa Kulu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	1 Unit Kerja	2.397.953.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Loa Kulu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang	1 Unit Kerja	2.150.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penunjang Pelayanan					Pelayanan			
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Mangkurawang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.153.546.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Mangkurawang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.800.000.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Marangkayu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.733.581.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Marangkayu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.700.000.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Muara Badak	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.901.079.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Muara Badak	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.600.000.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Muara Jawa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.210.381.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Muara Jawa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.100.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Muara Kaman	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.278.747.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Muara Kaman	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	900.000.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Muara Muntai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.377.581.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Muara Muntai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	990.000.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Muara Wis	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	900.396.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Muara Wis	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	512.815.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Perangat	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.264.279.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Perangat	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	876.698.000	
	Pelayanan dan Penunjang	Puskesmas	Jumlah BLUD yang	1 Unit Kerja	2.843.581.0	Pelayanan dan Penunjang	Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	2.843.161.325	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan BLUD	Rapak Mahang	Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		00	Pelayanan BLUD	Rapak Mahang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Rimba Ayu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.315.737.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Rimba Ayu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.150.000.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Ritan Baru	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	887.698.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Ritan Baru	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	505.000.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Samboja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.767.424.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Samboja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.379.843.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sanga-Sanga	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	1 Unit Kerja	1.606.781.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sanga-Sanga	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang	1 Unit Kerja	1.300.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penunjang Pelayanan					Pelayanan			
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sebulu I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.736.930.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sebulu I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.500.000.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sebulu II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.955.537.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sebulu II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.150.000.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Separi III	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.307.371.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Separi III	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	919.790.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sungai Mariam	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.415.414.530	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sungai Mariam	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.027.834.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sungai Merdeka	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.752.866.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Sungai Merdeka	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.365.285.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Tabang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	638.854.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Tabang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	410.000.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Teluk Dalam	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.740.253.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Puskesmas Teluk Dalam	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.355.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kab. Kutai Kartanegara	Presentasi Balita Stunting	14,1 Persen	130.422.250.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kab. Kutai Kartanegara	Presentasi Balita Stunting	14,1 Persen	322.231.478.280	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Kutai Kartanegara	Indeks Keluarga sehat	0,4 Persen			Kab. Kutai Kartanegara	Indeks Keluarga sehat	0,4 Persen		
		Kab. Kutai Kartanegara	Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	0,76 Persen			Kab. Kutai Kartanegara	Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	0,76 Persen		
		Kab. Kutai Kartanegara	Indeks Pelayanan kesehatan balita	0,77 Persen			Kab. Kutai Kartanegara	Indeks Pelayanan kesehatan balita	0,77 Persen		
		Kab. Kutai Kartanegara	Indeks Pelayanan Penyakit menular	0,63 Persen			Kab. Kutai Kartanegara	Indeks Pelayanan Penyakit menular	0,63 Persen		
		Kab. Kutai Kartanegara	Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	0,52 Persen			Kab. Kutai Kartanegara	Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	0,52 Persen		
		Kab. Kutai Kartanegara	Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	0,89 Persen			Kab. Kutai Kartanegara	Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	0,89 Persen		
		Kab. Kutai	Indeks Pelayanan	0,43 Persen			Kab. Kutai	Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,43 Persen		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kartanegara	Kesehatan Primer				Kartanegara				
		Kab. Kutai Kartanegara	Indeks Perilaku kesehatan	0,48 Persen			Kab. Kutai Kartanegara	Indeks Perilaku kesehatan	0,48 Persen		
		Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	31,25 Persen			Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	31,25 Persen		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	78 Persen	36.300.000.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	78 Persen	134.266.266.000	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap	1 Unit		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap	0 Unit	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Penduduk Minimal 1:1000					Jumlah Penduduk Minimal 1:1000			
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	10.000.000.000	Pembangunan Puskesmas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	3 Unit	7.700.000.000	
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	8 Unit	4.000.000.000	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	10 Unit	12.930.000.000	
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 Unit	700.000.000	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	8 Unit	9.750.000.000	
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar	2 Unit	2.000.000.000	Pengembangan Puskesmas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	8 Unit	20.550.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sesuai Standar								
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	6 Unit	1.200.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4 Unit	1.000.000.000	
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	6 Unit	1.000.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	13 Unit	3.550.000.000	
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan	3 Unit	600.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan	3 Unit	750.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan					Pemeliharaan			
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	19 Unit	1.000.000.000	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	-	Sub Kegiatan di hapus pada KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.5.5-1317 TAHUN 2023
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	2.300.000.000	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	-	Sub Kegiatan di hapus pada KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.5.5-1317 TAHUN 2023
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan	Kab. Kutai	Jumlah Alat Kesehatan/Alat	8 Unit	2.500.000.0	Pengadaan Alat Kesehatan	Kab. Kutai	Jumlah Alat Kesehatan/Alat	33 Unit	9.750.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kartanegara	Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		00	/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kartanegara	Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	1 Unit	500.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	1 Unit	500.000.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	300 jenis	5.000.000.000	Pengadaan Obat, Vaksin	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	0 Paket	-	Sub Kegiatan di hapus pada KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.5.5-

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											1317 TAHUN 2023
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	250 jenis	4.500.000.000	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	0 Paket	-	Sub Kegiatan di hapus pada KEPMEND AGRI NOMOR 900.1.5.5-1317 TAHUN 2023
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	5 Unit	500.000.000	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	0 Unit	-	Sub Kegiatan di hapus pada KEPMEND AGRI NOMOR 900.1.5.5-1317 TAHUN 2023
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan	Kab.	Jumlah Alat	1 Paket		Pemeliharaan	Kab.	Jumlah Alat	2 Unit		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kutai Kartanegara	Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		500.000.000	Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kutai Kartanegara	Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		500.000.000	
1.02.02.2.01.22	Pengembangan Rumah Sakit	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal	Unit		Pengembangan Rumah Sakit	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau	7 Unit	52.036.266.000	Pengembangan Rumah Sakit Muara Badak

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit					dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit			
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	107 5 Paket	14.785.000.000	
1.02.02.2.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan	Keluarga		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	165 386 Keluarga	465.000.000	Sub Kegiatan baru mengganti kan sub kegiatan Pengelolaa n Upaya Kesehatan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Puskesmas								Khusus
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	100 Persen	90.446.250.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara		100 Persen	177.164.212.280	
		Kab. Kutai Kartanegara	Persentase KB Aktif	68 Persen			Kab. Kutai Kartanegara	Persentase KB Aktif	68 Persen		
		Kab. Kutai Kartanegara	Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	94,6 Persen			Kab. Kutai Kartanegara	Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	94,6 Persen		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Persen	2.500.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13.072 Orang	2.249.484.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan	Kab.	Jumlah Ibu	Perse		Pengelolaan	Kab.	Jumlah Ibu	Oran		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kutai Kartanegara	Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 n	1.000.000.000	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kutai Kartanegara	Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13.058 g	1.000.000.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Persen	256.250.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27.436 Orang	306.250.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Persen	205.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	62.179 Orang	450.000.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	100 Persen	410.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	141.016 Orang	430.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Standar								
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Persen	600.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	506.000 Orang	750.000.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Persen	410.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	56.316 Orang	410.000.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Persen	525.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	82.260 Orang	525.000.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan	Kab.	Jumlah	Perse		Pengelolaan	Kab.	Jumlah	Oran		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Kutai Kartanegara	Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 n	525.000.000	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Kutai Kartanegara	Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50.000 g	525.000.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Persen	650.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	892 Orang	570.000.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Persen	650.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24.418 Orang	600.000.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan	Kab. Kutai	Jumlah Orang Terduga	100 Persen	650.000.00	Pengelolaan Pelayanan	Kab. Kutai	Jumlah Orang Terduga	28.9 Orang	600.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kartanegara	Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0	Kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kartanegara	Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	80		
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100 Persen	450.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	32 Dokumen	222.870.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai	100 Persen	350.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	350.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Standar								
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	80 Persen	1.500.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	836 Dokumen	6.260.632.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	60 Persen	180.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	300.000.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15 Desa	500.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	154 Dokumen	2.115.560.000	
1.02.02.2.02.18						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	334 Dokumen	565.000.000	Sub kegiatan baru pengikuti pemetaan DAK NF 2024

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	32 orang	175.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	675.000.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	94,6 Persen	1.000.000.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	103 Dokumen	1.300.000.000	
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12000 Orang	650.000.000	Sub kegiatan baru pengikuti pemetaan DAK NF 2024
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan	Kab. Kutai	Jumlah Penyalahguna			Pengelolaan Pelayanan	Kab. Kutai	Jumlah Penyalahguna	Orang	150.000.000	Sub kegiatan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kartanegara	NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kartanegara	NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			baru pengikuti pemetaan DAK NF 2024
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	32 Puskesmas	500.000.000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	0 Dokumen	-	Sub Kegiatan di hapus pada KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.5.5-1317 TAHUN 2023
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Persen	500.000.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	42 Dokumen	750.000.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan	Kab. Kutai Kartane	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	105 orang 000	43.000.000.000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan	Kab. Kutai Kartane	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan	128 Dokumen 245	64.551.552.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Masyarakat	gara	Jaminan Kesehatan Masyarakat			Masyarakat	gara	Kesehatan Masyarakat			
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Sample/Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	100 Persen	60.000.000	Pengambilan dan Pengiriman Sample/Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	100 Paket	60.000.000	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	15 Kecamatan	100.000.000	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	100.000.000	
1.02.02.2.02.32						Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4 Dokumen	45.000.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan	Kab. Kutai	Jumlah Dokumen	96 Puskesma	32.000.000.	Operasional Pelayanan	Kab. Kutai	Jumlah Dokumen	64 Puskesma	39.365.364.280	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Puskesmas	Kartanegara	Operasional Pelayanan Puskesmas	s	000	Puskesmas	Kartanegara	Operasional Pelayanan Puskesmas	s		
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Badak Baru	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	1.064.302.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Badak Baru	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1.410.805.500	
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Batuah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	638.581.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Batuah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	727.969.500	
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Bunga Jadi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	1.135.255.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Bunga Jadi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1.366.611.500	
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Handil Baru	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	1.206.208.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Handil Baru	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1.378.756.500	
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Jonggo	Jumlah Dokumen Operasional	3 Dokumen	938.705.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Kutai Kartane	Jumlah Dokumen Operasional	2 Dokumen	1.048.883.500	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		n Jaya	Pelayanan Puskesmas			Jonggon Jaya	gara	Pelayanan Puskesmas			
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kahala	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	922.395.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Kahala	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1.044.453.500	
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	1.206.208.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Kembang Janggut	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1.334.206.500	
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kota Bangun	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	1.135.254.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Kota Bangun	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1.277.112.500	
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Loa Duri	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	851.441.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Loa Duri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1.057.589.500	
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Loa Ipuh	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	3 Dokumen	851.441.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Loa Ipuh	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	2 Dokumen	1.063.615.500	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Puskesmas					Puskesmas			
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Loa Janan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	809.534.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Loa Janan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1.064.617.500	
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Loa Kulu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	1.206.208.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Loa Kulu	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1.390.636.500	
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Mangkurawang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	993.348.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Mangkurawang	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1.165.896.500	
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Marangkayu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	928.073.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Marangkayu	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1.346.941.500	
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Muara Badak	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	922.395.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Muara Badak	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1.094.532.500	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Muara Jawa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	993.348.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Muara Jawa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1.671.918.500	
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Muara Kaman	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	1.277.162.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Muara Kaman	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1.855.122.500	
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Muara Muntai	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	1.206.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Muara Muntai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1.361.718.500	
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Muara Wis	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	1.064.302.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Muara Wis	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1.253.434.500	
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Perangat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	851.441.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Perangat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	955.679.500	
-	Operasional	Puskes	Jumlah	3 Doku		Operasional	Kab.	Jumlah	2 Doku		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan Puskesmas	mas Rapak Mahang	Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	men	993.348.000	Pelayanan Puskesmas Rapak Mahang	Kutai Kartanegara	Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	men	1.132.236.500	
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Rimba Ayu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	851.441.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Rimba Ayu	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1.026.814.500	
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Ritan Baru	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	922.395.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Ritan Baru	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1.038.792.500	
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Samboja	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	851.441.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Samboja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1.102.569.500	
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sanga-Sanga	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	922.395.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Sanga-sanga	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1.138.644.500	
-	Operasional Pelayanan	Puskesmas	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	1.135.255.0	Operasional Pelayanan	Kab. Kutai	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	1.352.353.500	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Puskesmas	Sebulu I	Operasional Pelayanan Puskesmas		00	Puskesmas Sebulu I	Kartanegara	Operasional Pelayanan Puskesmas			
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sebulu II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	803.220.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Sebulu II	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	923.298.500	
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Separi III	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	919.790.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Separi 3	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1.073.528.500	
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sungai Mariam	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	1.206.208.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Meriam	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1.533.037.500	
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sungai Merdeka	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	993.349.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Merdeka	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1.365.221.500	
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tabang	Jumlah Dokumen Operasional	3 Dokumen	1.064.302.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Kutai Kartane	Jumlah Dokumen Operasional	2 Dokumen	1.257.659.780	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelayanan Puskesmas			Tabang	gara	Pelayanan Puskesmas			
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Teluk Dalam	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	1.135.255.000	Operasional Pelayanan Puskesmas Teluk Dalam	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1.550.705.500	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Faskes lainnya	750.000.000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	750.000.000	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten /Kota	75 Persen	1.000.000.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten /Kota	1 Unit	1.000.000.000	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan	Laporan		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	2 Laporan	75.000.000	Sub kegiatan baru pengikuti pemetaan DAK NF

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal		Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal		dan Pemberian Obat Massal)			2024
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	unit		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	600.000.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1464 Orang	1.300.000.000	
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan	Kab.	Jumlah Orang	Oran		Pengelolaan	Kab.	Jumlah Orang	153 Oran		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kutai Kartanegara	dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	g		pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kutai Kartanegara	dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	g	1.600.000.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	500 Orang	150.000.000	
1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	33 Dokumen	350.000.000	Sub kegiatan baru pengikuti pemetaan DAK NF 2024
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Faskes lainnya		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	13001 Dokumen	507.500.000	Sub kegiatan baru pengikuti pemetaan DAK NF 2024
1.02.02.2.03	Penyelenggara	Kab.	Tersedia dan	30 Faske		Penyelenggara	Kab.	Tersedia dan	30 Fask		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	an Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Kutai Kartanegara	terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi pada faskes	s	2.376.000.000	an Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Kutai Kartanegara	terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi pada faskes	es	2.576.000.000	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3 Dokumen	600.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	0 Dokumen	-	Sub Kegiatan di hapus pada KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.5.5-1317 TAHUN 2023
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	36 Puskesmas	1.200.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen	2.576.000.000	
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat / Perangkat Sistem	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi	1 Paket	576.000.000	Pengadaan Alat / Perangkat Sistem	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi	0 Unit	-	Sub Kegiatan di hapus pada

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan			Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan			KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.5.5-1317 TAHUN 2023
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah sakit kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Terpantaunya Pelayanan Kesehatan Rujukan	100 Persen	1.300.000.000	Penerbitan Izin Rumah sakit kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Terpantaunya Pelayanan Kesehatan Rujukan	100 Persen	8.225.000.000	
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	100 Persen	900.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	125 Unit	900.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan Kesehatan Lainnya					Pelayanan Kesehatan Lainnya					
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	0 Unit		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	7.125.000.000	
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	35 Faskes	400.000.000	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	200.000.000	
1.02.02.3.02						Penyediaan Layanan Kesehatan	Kab. Kutai Kartane	Terpenuhinya Layanan Kesehatan untuk	100 Persen	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	gara	UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			
1.02.02.3.02.46	Pengelolaan Manajemen Puskesmas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas	Dokumen		Pengelolaan Manajemen Puskesmas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas	0 Dokumen	-	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase SDM yang Terlatih sesuai Kompetensinya	80 Persen	1.750.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase SDM yang Terlatih sesuai Kompetensinya	80 Persen	2.620.000.000	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten /Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Izin Praktik Tenaga Kesehatan yang diberikan	150 izin	350.000.000	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten /Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Izin Praktik Tenaga Kesehatan yang diberikan	150 izin	750.000.000	
1.02.03.2.01.02	Pembinaan	Kab.	Jumlah	35 Unit		Pembinaan	Kab.	Jumlah Dokumen	250 Doku		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kutai Kartanegara	Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		350.000.000	dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kutai Kartanegara	Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	0 men	750.000.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan	80 persen	900.000.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan	80 persen	870.000.000	
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi	44 orang	400.000.000	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta	44 Dokumen	400.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Manusia Kesehatan		serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Manusia Kesehatan		Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	44 orang	500.000.000	Pemenuhan Kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	54 Orang	370.000.000	
1.02.03.2.02.03						Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	100.000.000	Sub kegiatan baru pengikuti pemetaan DAK NF 2024
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah SDMK meningkat kompetensinya	100 orang	500.000.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah SDMK meningkat kompetensinya	100 orang	1.000.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 orang	500.000.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	400 Orang	1.000.000.000	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kab. Kutai Kartanegara	Terselenggaranya pelayanan perizinan , pengawasan dan pengendalian sediaan farmasi, alkes dan makanan minuman	100 persen	353.500.000	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kab. Kutai Kartanegara	Terselenggaranya pelayanan perizinan , pengawasan dan pengendalian sediaan farmasi, alkes dan makanan minuman	100 persen	893.500.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Kutai Kartanegara	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memilki izin	100 persen	160.000.000	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Kutai Kartanegara	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memilki izin	100 persen	200.000.000	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisonal (UMOT)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	75 Persen	85.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisonal (UMOT)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	75 Dokumen	200.000.000	
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan	Kab. Kutai	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko	1 Dokumen	10.000.000	Penyediaan dan	Kab. Kutai	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko	0 Sarana	-	Sub Kegiatan di

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisonal (UMOT)	Kartanegara	Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisonal (UMOT)	Kartanegara	Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			hapus pada KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.5.5-1317 TAHUN 2023
1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi	40 Persen	65.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi	0 Sarana	-	Sub Kegiatan di hapus pada KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.5.5-

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Obat Tradisonal (UMOT)		Komitmen Izin			Obat Tradisonal (UMOT)		Komitmen Izin			1317 TAHUN 2023
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Kutai Kartanegara	Terselenggaranya proses penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	15 sertifikat	105.000.000	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Kutai Kartanegara	Terselenggaranya proses penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	15 sertifikat	105.000.000	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	50 Persen	105.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	280 Dokumen	105.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
1.02.04.2.04						Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah	Kab. Kutai Kartanegara			250.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					
1.02.04.2.04.01						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	942 Dokumen	250.000.000	
1.02.04.2.05						Penerbitan Stiker	Kab. Kutai			250.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kartanegara				
1.02.04.2.05.01						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	253 Dokumen	250.000.000	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk	Kab. Kutai Kartanegara	Terselenggaranya pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi	35 Persen	88.500.000	Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk	Kab. Kutai Kartanegara	Terselenggaranya pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan	35 Persen	88.500.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	makanan minuman industri rumah tangga		dan produk makanan minuman industri rumah tangga			makanan minuman industri rumah tangga		minuman industri rumah tangga			
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	35 Persen	78.500.000	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	150 Unit	88.500.000	
1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 Dokumen	10.000.000	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	0 Dokumen	-	Sub Kegiatan di hapus pada KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.5.5-

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rumah Tangga					Rumah Tangga					1317 TAHUN 2023
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Capaian RT-PHBS	36 Persen	662.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Capaian RT-PHBS	36 Persen	1.100.000.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Prosentase Puskesmas dengan Desa Germas.	50 Persen	250.000.000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Prosentase Puskesmas dengan Desa Germas.	50 Persen	350.000.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan	2 Kali	250.000.000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan	105 Dokumen	350.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Masyarakat		Pemberdayaan Masyarakat			Masyarakat		Masyarakat			
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Prosentase Puskesmas dengan Memanfaatan Media Cetak, Elektronik dan Media Sosial aktif	55 Persen	260.000.000	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Prosentase Puskesmas dengan Memanfaatan Media Cetak, Elektronik dan Media Sosial aktif	55 Persen	300.000.000	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	55 Persen	260.000.000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	155 Dokumen	300.000.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	Kab. Kutai Kartanegara	Prosentase Desa Siaga aktif dengan UKBM aktif	36 Persen	152.000.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	Kab. Kutai Kartanegara	Prosentase Desa Siaga aktif dengan UKBM aktif	36 Persen	450.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daya Masyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Daya Masyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	36 Persen	152.000.000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	36 Dokumen	450.000.000	
					331.247.153.116					758.277.726.026	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan didapatkan dari hasil Musrenbang maupun usulan lainnya dari masyarakat. Usulan yang datang dari masyarakat pada umumnyaterkait dengan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana fisik fasilitas pelayanan kesehatan, pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, khususnya untuk pelayanan yang bersifat kuratif medik, perbaikan dan peningkatan akses masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, bantuan-bantuan perbaikan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, seperti perbaikan gizi, penyediaan sarana sanitasi bagi masyarakat, termasuk juga pemagaran sarana kesehatan dan pavingisasi halaman.

Pada Rancangan Awal Renja ini belum memuat usulan dari masyarakat, karena belum adanya data yang diterima oleh Dinas Kesehatan dan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang baru akan dilaksanakan.

TC-3.2

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi Puskesmas	Puskesmas Rimba Ayu Kec. Kota Bangun Darat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	diusulkan pada APBD-P 2024
2	Rehab Puskesmas Pembantu	Ds.Sebemban RT. 04 Kec. Muara Wis	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas	1	diusulkan pada APBD-P 2024
		Ds. Wonosari Kec Kota Bangun Darat		1	
		Ds. Tanjung Harapan RT. I Kec. Samboja		1	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			Kesehatan Lainnya		
		Ds. Argosari Kec. Samboja		1	
		Kel. Teluk Pemedas Kec. Samboja		1	
		Ds.Teluk Bingkai (Pembangunan Halaman Parkir dan Semenisasi Halaman Pusban) Kec. Kenohan	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	diusulkan pada APBD-P 2024
		Ds.Genting Tanah Kec. Kembang Janggut		1	Akan dibangun tahun 2024
		Kel.Tama Pole (Rehab Bangunan & Pengurukan Halaman Pusban) Kec. Muara Jawa		1	
		Dusun Binamulya, RT 16 Buana Jaya Kec. Tenggarong Seberang		1	Akan dibangun tahun 2024
3	Pengadaan ambulance Desa Darat & Air				
		Ds.Lebak Mantan Kec. Muara Wis		1	
		Ds.Sebemban Kec. Muara Wis		1	
		Ds.Wonosari Kec. Kota Bangun Darat		1	
		Ds.Kota Bangun II Kec. Kota Bangun Darat		1	
		Ds.Kota Bangun Ilir Kec. Kota Bangun		1	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		Ds.Puan Cepak Kec. Muara Kaman		1	
		Ds.Liang Buaya Kec. Muara Kaman		1	
		Ds, Muara Aloh Kec. Muara Muntai		1	
		Ds. Muai Kec. Kembang Janggut		1	
		Kel. Dondang Kec. Muara Jawa		1	
		Kel.Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa		1	
		Ds. Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak		1	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan misi pembangunan pertama dan kedua yaitu :

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat

   Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan sesuai dengan misi pertama pembangunan yaitu Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumber daya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah dengan indikator :

   a. Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
   b. Indeks Kepuasan Masyarakat
   c. Indeks Partisipasi Masyarakat

2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten

   Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan sesuai dengan misi kedua pembangunan yaitu Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, sehat, berpendidikan, terampil, berakhlak dan berperilaku mulia. Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dengan indikator :

   a. Angka Harapan Hidup
   b. Angka Kematian Ibu Melahirkan
   c. Angka Kematian Bayi

   3. Meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan kerjasama pembangunan daerah. Meningkatnya Kerjasama Coorporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pembangunan Daerah, dengan indikator Cakupan Fasilitasi CSR

Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara 2021 s/d 2026 adalah :

"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berbahagia "

Misi yang digariskan dalam upaya mencapai visi tersebut adalah:

1. Memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya.
3. Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif.
4. Meningkatkan kualitas layanan infrastuktur dasar dan konektivitas antar wilayah.
5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Dari visi dan misi yang telah ditetapkan maka tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024 yang ditetapkan adalah sejalan dengan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

A. Tujuan:

Tujuan pembangunan kesehatan adalah Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, hal ini guna mencapai tujuan fokus pembangunan daerah sebagaimana tertuang pada misi kedua pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya.

B. Sasaran:

Secara umum sasaran pembangunan kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 adalah meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga sejalan dengan capaian sasaran pada Renstra Dinas Kesehatan 2021-2026 antara lain sebagai berikut :

- Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB);
- Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI);

- Meningkatnya Indeks Pembangunan kesehatan Masyarakat (IPKM);
- Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bagian dari sistem manajemen perencanaan pembangunan partisipasif yaitu pendekatan yang lebih mengedepankan dan mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penyusunan kebijakan maupun penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan perencanaan diawali dari Musrenbang Tingkat Kecamatan, Musrenbang tingkat Kabupaten, Musrenbang tingkat provinsi dan Musrenbang tingkat nasional, rencana kerja yang dibuat mengacu pada RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 serta sinkronisasi dari berbagai usulan dengan memperhatikan agenda pembangunan di Pusat, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Pelaksanaan pembangunan kesehatan tahun anggaran 2025 yang dilakukan disesuaikan ketersediaan sumber daya sarana, prasarana, tenaga dan

anggaran yang tersedia disusun dalam program dan kegiatan yang terdiri dari 5 program dengan 22 kegiatan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan, yaitu:
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 3 sub kegiatan
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 3 sub kegiatan
   3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan 2 sub kegiatan
   4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Aparatur dengan 8 sub kegiatan
   5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 8 sub kegiatan
   6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 4 sub kegiatan
   7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 4 sub kegiatan
   8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 4 sub kegiatan
   9. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan 32 sub kegiatan

B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu:
   1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Upaya Kesehatan Masyarakat dengan 14 sub kegiatan
   2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan 67 sub kegiatan
   3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi dengan 1 sub kegiatan
   4. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan 3 sub kegiatan

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
   1. Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten /Kota dengan 1 sub kegiatan
   2. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota dengan 3 sub kegiatan
   3. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan

D. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
   1. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dengan 1 sub kegiatan
   2. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga dengan 1 sub kegiatan
   3. Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga dengan 1 sub kegiatan

E. Program Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
   1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan
   2. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan
   3. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan

c. Program dan Kegiatan tidak Sesuai dengan rancangan Awal RKPD

Pada penyusunan RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2025 terdapat penyesuaian terhadap sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri No. 900.1.5.5-1317 Tahun 2023. Berikut sub kegiatan yang mengalami penyesuaian :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sub Kegiatan Baru
2	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Sub Kegiatan Baru
3	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah BerdasarkanBidang Urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Sub Kegiatan Baru
B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
4	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sub Kegiatan di hapus pada KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.5.5-1317 TAHUN 2023
5	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sub Kegiatan di hapus pada KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.5.5-1317 TAHUN 2023
6	Pengadaan Obat, Vaksin	Sub Kegiatan di hapus pada KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.5.5-1317 TAHUN 2023
7	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Sub Kegiatan di hapus pada KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.5.5-1317 TAHUN 2023
8	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sub Kegiatan di hapus pada KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.5.5-1317 TAHUN 2023
9	Pengembangan Rumah Sakit	Sub Kegiatan Baru
10	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Sub Kegiatan Baru
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Sub Kegiatan Baru
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
12	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Sub kegiatan baru pengikuti pemetaan DAK NF 2024
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Sub kegiatan baru pengikuti pemetaan DAK NF 2024
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Sub kegiatan baru pengikuti pemetaan DAK NF 2024
15	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Sub Kegiatan di hapus pada KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.5.5-1317 TAHUN 2023
16	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal	Sub kegiatan baru pengikuti pemetaan DAK NF 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
17	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Sub Kegiatan Baru
18	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Sub Kegiatan Baru
19	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Sub Kegiatan Baru
20	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Sub Kegiatan Baru
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Sub kegiatan baru pengikuti pemetaan DAK NF 2024
22	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Sub kegiatan baru pengikuti pemetaan DAK NF 2024
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
23	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Sub Kegiatan di hapus pada KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.5.5-1317 TAHUN 2023
24	Pengadaan Alat / Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Sub Kegiatan di hapus pada KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.5.5-1317 TAHUN 2023
C	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
25	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sub kegiatan baru pengikuti pemetaan DAK NF 2024
D	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
26	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisonal (UMOT)	Sub Kegiatan di hapus pada KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.5.5-1317 TAHUN 2023
27	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisonal (UMOT)	Sub Kegiatan di hapus pada KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.5.5-1317 TAHUN 2023
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
28	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Sub Kegiatan Baru
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
29	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Sub Kegiatan Baru

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
	Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	
30	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Sub Kegiatan di hapus pada KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.5.5-1317 TAHUN 2023

d. Tabel Rencana Program dan Kegiatan

Kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja ini adalah kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja bidang kesehatan, terutama IKU, SDGs, SPM dan target-target RPJMD dalam rangka menunjang Visi dan Misi Bupati dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk lebih lengkap rumusan rencana program dan kegiatan yang memuat program dan kegiatan untuk semua sumber dana, dapat dilihat pada tabel yang kami sajikan dibawah ini.

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangakat Daerah : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	80	Nilai	431.432.747.746			80,01	Nilai	198.184.403.116
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	4	Dokumen	1.500.000.000			4	Dokumen	1.200.000.000
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	4	Dokumen	750.000.000			2	Dokumen	500.000.000
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Kab. Kutai Kartanegara	3	Laporan	250.000.000			2	Laporan	350.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1	Laporan	150.000.000			4	Laporan	350.000.000
1.02.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1	Dokumen	50.000.000					
1.02.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1	Data	250.000.000					
1.02.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah BerdasarkanBidang Urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1	Berita Acara	50.000.000					
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah laporan Administrasi Keuangan	Kab. Kutai Kartanegara	4	laporan	347.946.998.7			4	laporan	101.066.160.586

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	Daerah	Perangkat Daerah yang akuntabel				46					
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	2520	Orang /bulan	346.587.350.606			920	Orang /bulan	99.506.512.446
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1	Laporan	250.000.000			2	Laporan	450.000.000
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	12	Laporan	1.109.648.140			12	Laporan	1.109.648.140
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	2	Dokumen	100.000.000			2	Dokumen	250.000.000
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan	Jumlah Laporan	Kab. Kutai	1	Laporan				1	Lapora	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kartanegara			100.000.000				n	50.000.000
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	0	Laporan	-			16	Laporan	200.000.000
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	3	Dokumen	1.050.000.000			3	Dokumen	2.225.000.000
1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	4	Unit	100.000.000			2	Unit	100.000.000
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Kartanegara	0	Paket	-			500	Paket	125.000.000
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	1	Dokumen	200.000.000			12	Dokumen	200.000.000
1.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan	Kab. Kutai Kartanegara	1	Dokumen	200.000.000			34	Dokumen	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	Kepegawaian	Sistem Informasi Kepegawaian									
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	1	Dokumen	200.000.000			34	Dokumen	200.000.000
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kutai Kartanegara	0	Orang	-			200	Orang	800.000.000
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	64	Orang	100.000.000			50	Orang	100.000.000
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	64	Orang	250.000.000			50	Orang	500.000.000
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	8	layanan	2.060.000.000			8	layanan	2.760.000.000
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen	Kab. Kutai Kartanegara	1	Paket	100.000.000			12	Paket	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan									
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1	Paket	200.000.000			12	Paket	200.000.000
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1	Paket	200.000.000			14870	Paket	200.000.000
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1	Paket	350.000.000			1	Paket	350.000.000
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	250	Dokumen	50.000.000			250	Dokumen	50.000.000
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kutai Kartanegara	1	Laporan	50.000.000			900	Laporan	50.000.000
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Kab. Kutai Kartanegara	12	Laporan	800.000.000			12	Laporan	1.500.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1	Dokumen	310.000.000			32	Dokumen	310.000.000
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang diadakan	Kab. Kutai Kartanegara	22	unit	475.000.000			22	unit	1.425.000.000
1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	0	Unit	-			15	Unit	150.000.000
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1	Unit	400.000.000			5	Unit	400.000.000
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	10	Unit	75.000.000			1	Unit	75.000.000
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	0	Unit	-			1	Unit	800.000.000
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa	Jumlah waktu	Kab. Kutai	12	bulan				12	bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kartanegara			32.055.000.000					33.655.000.000
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	1	Laporan	5.000.000			12	Laporan	5.000.000
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	3	Laporan	3.000.000.000			12	Laporan	3.500.000.000
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1	Laporan	150.000.000			12	Laporan	150.000.000
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	2	Laporan	28.900.000.000			12	Laporan	30.000.000.000
1.02.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	95	Unit	1.245.749.000			95	Unit	1.245.749.000
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan	Kab. Kutai	6	Unit				95	Unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kartanegara			250.000.000					250.000.000
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara	10	Unit	150.000.000			95	Unit	150.000.000
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara	25	Unit	200.000.000			12	Unit	200.000.000
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	1	Unit	645.749.000			3	Unit	645.749.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA	Kab. Kutai Kartanegara	30	Puskesmas	45.000.000.000			32	Puskesmas	54.357.493.530
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan	Jumlah BLUD yang	Kab. Kutai	32	Unit				32	Unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	Penunjang Pelayanan BLUD	Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kartanegara		Kerja	45.000.000.000				Kerja	54.357.493.530
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Badak Baru	1	Unit Kerja	1.250.000.000			1	Unit Kerja	1.589.525.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Batuah	1	Unit Kerja	1.100.000.000			1	Unit Kerja	1.252.081.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Bunga Jadi	1	Unit Kerja	1.048.011.675			1	Unit Kerja	1.377.707.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Handil Baru	1	Unit Kerja	1.450.000.000			1	Unit Kerja	2.027.751.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Jonggon Jaya	1	Unit Kerja	820.000.000			1	Unit Kerja	1.104.069.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang	Puskesmas Kahala	1	Unit Kerja	896.562.000			1	Unit Kerja	1.284.143.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
		Pelayanan									
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kembang Janggut	1	Unit Kerja	1.100.000.000			1	Unit Kerja	1.962.461.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Kota Bangun	1	Unit Kerja	1.800.000.000			1	Unit Kerja	1.993.581.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Loa Duri	1	Unit Kerja	1.400.000.000			1	Unit Kerja	1.733.864.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Loa Ipuh	1	Unit Kerja	1.900.000.000			1	Unit Kerja	1.863.413.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Loa Janan	1	Unit Kerja	1.700.000.000			1	Unit Kerja	1.982.909.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Loa Kulu	1	Unit Kerja	2.150.000.000			1	Unit Kerja	2.397.953.000
	Pelayanan dan	Jumlah BLUD yang	Puskesmas	1	Unit				1	Unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	Penunjang Pelayanan BLUD	Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Mangkurawang		Kerja	1.800.000.000				Kerja	2.153.546.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Marangkayu	1	Unit Kerja	1.700.000.000			1	Unit Kerja	1.733.581.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Muara Badak	1	Unit Kerja	1.600.000.000			1	Unit Kerja	1.901.079.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Muara Jawa	1	Unit Kerja	2.100.000.000			1	Unit Kerja	2.210.381.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Muara Kaman	1	Unit Kerja	900.000.000			1	Unit Kerja	1.278.747.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Muara Muntai	1	Unit Kerja	990.000.000			1	Unit Kerja	1.377.581.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang	Puskesmas Muara Wis	1	Unit Kerja	512.815.000			1	Unit Kerja	900.396.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
		Pelayanan									
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Perangat	1	Unit Kerja	876.698.000			1	Unit Kerja	1.264.279.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Rapak Mahang	1	Unit Kerja	2.843.161.325			1	Unit Kerja	2.843.581.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Rimba Ayu	1	Unit Kerja	1.150.000.000			1	Unit Kerja	1.315.737.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Ritan Baru	1	Unit Kerja	505.000.000			1	Unit Kerja	887.698.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Samboja	1	Unit Kerja	2.379.843.000			1	Unit Kerja	2.767.424.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Sanga-Sanga	1	Unit Kerja	1.300.000.000			1	Unit Kerja	1.606.781.000
	Pelayanan dan	Jumlah BLUD yang	Puskesmas	1	Unit				1	Unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	Penunjang Pelayanan BLUD	Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Sebulu I		Kerja	1.500.000.000				Kerja	1.736.930.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Sebulu II	1	Unit Kerja	2.150.000.000			1	Unit Kerja	1.955.537.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Separi III	1	Unit Kerja	919.790.000			1	Unit Kerja	1.307.371.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Sungai Mariam	1	Unit Kerja	2.027.834.000			1	Unit Kerja	2.415.414.530
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Sungai Merdeka	1	Unit Kerja	1.365.285.000			1	Unit Kerja	1.752.866.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Tabang	1	Unit Kerja	410.000.000			1	Unit Kerja	638.854.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang	Puskesmas Teluk Dalam	1	Unit Kerja	1.355.000.000			1	Unit Kerja	1.740.253.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
		Pelayanan									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentasi Balita Stunting	Kab. Kutai Kartanegara	14,1	Persen	322.231.478.280			13,8	Persen	130.422.250.000
		Indeks Keluarga sehat	Kab. Kutai Kartanegara	0,4	Persen				0,5	Persen	
		Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Kutai Kartanegara	0,76	Persen				0,77	Persen	
		Indeks Pelayanan kesehatan balita	Kab. Kutai Kartanegara	0,77	Persen				0,78	Persen	
		Indeks Pelayanan Penyakit menular	Kab. Kutai Kartanegara	0,63	Persen				0,65	Persen	
		Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Kab. Kutai Kartanegara	0,52	Persen				0,54	Persen	
		Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Kab. Kutai Kartanegara	0,89	Persen				0,9	Persen	
		Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Kab. Kutai Kartanegara	0,43	Persen				0,45	Persen	
		Indeks Perilaku kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	0,48	Persen				0,49	Persen	
		Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Kab. Kutai Kartanegara	31,25	Persen				34,38	Persen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	Kab. Kutai Kartanegara	78	Persen	134.266.266.000			80	Persen	36.300.000.000
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Kab. Kutai Kartanegara	0	Unit	-			0	Unit	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Kab. Kutai Kartanegara	3	Unit	7.700.000.000			1	Unit	10.000.000.000
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Kab. Kutai Kartanegara	10	Unit	12.930.000.000			8	Unit	4.000.000.000
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Kab. Kutai Kartanegara	8	Unit	9.750.000.000			1	Unit	700.000.000
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM	Kab. Kutai Kartanegara	8	Unit	20.550.000.000			1	Unit	2.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
		agar Sesuai Standar									
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. Kutai Kartanegara	4	Unit	1.000.000.000			5	Unit	1.200.000.000
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	13	Unit	3.550.000.000			6	Unit	1.000.000.000
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kab. Kutai Kartanegara	3	Unit	750.000.000			3	Unit	600.000.000
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	0	Unit	-			9	Unit	1.000.000.000
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana	Jumlah Prasarana	Kab. Kutai	0	Unit				2	Unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kartanegara			-					2.300.000.000
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	33	Unit	9.750.000.000			9	Unit	2.500.000.000
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Kab. Kutai Kartanegara	1	Unit	500.000.000			1	Unit	500.000.000
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	0	Paket	-			300	Paket	5.000.000.000
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	0	Paket	-			300	Paket	4.500.000.000
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	Kab. Kutai Kartanegara	0	Unit	-			5	Unit	500.000.000
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin	Jumlah Alat	Kab. Kutai	2	Unit				1 paket	Unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kartanegara			500.000.000					500.000.000
1.02.02.2.01.22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Kab. Kutai Kartanegara	7	Unit	52.036.266.000					
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat,	Jumlah Obat, Bahan	Kab. Kutai	107	Paket				10	Paket	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kartanegara	5		14.785.000.000					
1.02.02.2.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kab. Kutai Kartanegara	165386	Keluarga	465.000.000				Keluarga	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	100	Persen	177.164.212.280			100	Persen	90.446.250.000
		Persentase KB Aktif	Kab. Kutai Kartanegara	68	Persen				70	Persen	
		Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	Kab. Kutai Kartanegara	94,6	Persen				95	Persen	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	Kab. Kutai Kartanegara	13.072	Orang	2.249.484.000			100	Orang	2.500.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
		Standar									
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	13.058	Orang	1.000.000.000			100	Orang	1.000.000.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	27.436	Orang	306.250.000			100	Orang	256.250.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	62.179	Orang	450.000.000			100	Orang	205.000.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	141.016	Orang	430.000.000			100	Orang	410.000.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	506.000	Orang	750.000.000			100	Orang	600.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
		Sesuai Standar									
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	56.316	Orang	410.000.000			100	Orang	410.000.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	82.260	Orang	525.000.000			100	Orang	525.000.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	50.000	Orang	525.000.000			100	Orang	525.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	892	Orang	570.000.000			100	Orang	650.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang	Kab. Kutai Kartanegara	24.418	Orang	600.000.000			100	Orang	650.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	Tuberkulosis	Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar									
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	28.980	Orang	600.000.000			100	Orang	650.000.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	32	Dokumen	222.870.000			100	Dokumen	450.000.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	1	Dokumen	350.000.000			100	Dokumen	350.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	Kab. Kutai Kartanegara	836	Dokumen	6.260.632.000			100 %	Dokumen	1.500.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
		Kesehatan Gizi Masyarakat									
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Kutai Kartanegara	4	Dokumen	300.000.000			65	Dokumen	180.000.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Kutai Kartanegara	154	Dokumen	2.115.560.000			15	Dokumen	500.000.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	334	Dokumen	565.000.000					
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	1	Dokumen	675.000.000			32	Dokumen	175.000.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	103	Dokumen	1.300.000.000			95	Dokumen	1.000.000.000
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	12.000	Orang	650.000.000				Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	-	Orang	150.000.000				Dokumen	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Kab. Kutai Kartanegara	-	Dokumen	-			32	Dokumen	500.000.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Kutai Kartanegara	42	Dokumen	750.000.000			100	Dokumen	500.000.000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	128.245	Dokumen	64.551.552.000			110000	Paket	43.000.000.000
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Sample/Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium	Kab. Kutai Kartanegara	100	Paket	60.000.000			100	Dokumen	60.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	Rujukan/Nasional	Rujukan/Nasional yang Didistribusikan									
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Kutai Kartanegara	1	Dokumen	100.000.000			18	Dokumen	100.000.000
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Kutai Kartanegara	4	Dokumen	45.000.000.000					
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Kutai Kartanegara	64	Puskesmas	39.365.364.280			96	Dokumen	32.000.000.000
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Badak Baru	2	Dokumen	1.410.805.500			3	Dokumen	1.064.302.000
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Batuah	2	Dokumen	727.969.500			3	Dokumen	638.581.000
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Bunga Jadi	2	Dokumen	1.366.611.500			3	Dokumen	1.135.255.000
-	Operasional	Jumlah Dokumen	Puskesmas						3	Dokum	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	Handil Baru	2	Dokumen	1.378.756.500				en	1.206.208.000
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Jonggon Jaya	2	Dokumen	1.048.883.500			3	Dokumen	938.705.000
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kahala	2	Dokumen	1.044.453.500			3	Dokumen	922.395.000
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kembang Janggut	2	Dokumen	1.334.206.500			3	Dokumen	1.206.208.000
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Kota Bangun	2	Dokumen	1.277.112.500			3	Dokumen	1.135.254.000
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Loa Duri	2	Dokumen	1.057.589.500			3	Dokumen	851.441.000
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	Puskesmas Loa Ipuh	2	Dokumen	1.063.615.500			3	Dokumen	851.441.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
		Puskesmas									
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Loa Janan	2	Dokumen	1.064.617.500			3	Dokumen	809.534.000
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Loa Kulu	2	Dokumen	1.390.636.500			3	Dokumen	1.206.208.000
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Mangkurawang	2	Dokumen	1.165.896.500			3	Dokumen	993.348.000
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Marangkayu	2	Dokumen	1.346.941.500			3	Dokumen	928.073.000
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Muara Badak	2	Dokumen	1.094.532.500			3	Dokumen	922.395.000
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Muara Jawa	2	Dokumen	1.671.918.500			3	Dokumen	993.348.000
-	Operasional	Jumlah Dokumen	Puskesmas						3	Dokum	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	Muara Kaman	2	Dokumen	1.855.122.500				en	1.277.162.000
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Muara Muntai	2	Dokumen	1.361.718.500			3	Dokumen	1.206.000.000
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Muara Wis	2	Dokumen	1.253.434.500			3	Dokumen	1.064.302.000
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Perangat	2	Dokumen	955.679.500			3	Dokumen	851.441.000
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Rapak Mahang	2	Dokumen	1.132.236.500			3	Dokumen	993.348.000
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Rimba Ayu	2	Dokumen	1.026.814.500			3	Dokumen	851.441.000
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	Puskesmas Ritan Baru	2	Dokumen	1.038.792.500			3	Dokumen	922.395.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
		Puskesmas									
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Samboja	2	Dokumen	1.102.569.500			3	Dokumen	851.441.000
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sanga-Sanga	2	Dokumen	1.138.644.500			3	Dokumen	922.395.000
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sebulu I	2	Dokumen	1.352.353.500			3	Dokumen	1.135.255.000
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sebulu II	2	Dokumen	923.298.500			3	Dokumen	803.220.000
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Separi III	2	Dokumen	1.073.528.500			3	Dokumen	919.790.000
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Sungai Mariam	2	Dokumen	1.533.037.500			3	Dokumen	1.206.208.000
-	Operasional	Jumlah Dokumen	Puskesmas						3	Dokum	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	Sungai Merdeka	2	Dokumen	1.365.221.500				en	993.349.000
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Tabang	2	Dokumen	1.257.659.780			3	Dokumen	1.064.302.000
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Teluk Dalam	2	Dokumen	1.550.705.500			3	Dokumen	1.135.255.000
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	1	Dokumen	750.000.000			2	Dokumen	750.000.000
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten /Kota	Kab. Kutai Kartanegara	1	Unit	1.000.000.000			100	Unit	1.000.000.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat	Kab. Kutai Kartanegara	2	Laporan	75.000.000				Laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
		Massal)									
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Kutai Kartanegara	1	unit	600.000.000				unit	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	1.464	Orang	1.300.000.000				Orang	
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	153	Orang	1.600.000.000				Orang	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah Dokumen pelayanan Kesehatan pada penderita Malaria	Kab. Kutai Kartanegara	500	Orang	150.000.000				Dokumen	
1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	33	Dokumen	350.000.000				Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
		reproduksi									
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Kutai Kartanegara	13.001	Dokumen	507.500.000				Dokumen	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedia dan terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi pada faskes	Kab. Kutai Kartanegara	30	Faskes	2.576.000.000			30	Faskes	2.376.000.000
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	0	Dokumen	-			3	Dokumen	600.000.000
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	3	Dokumen	2.576.000.000,00			36	Dokumen	1.200.000.000
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat / Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	0	Unit	-			1	Unit	576.000.000
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin	Terpantaunya	Kab. Kutai	100	Persen				100	Persen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	Rumah sakit kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kartanegara			8.225.000.000					1.300.000.000
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara	125	Unit	900.000.000			0	Unit	900.000.000
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Kab. Kutai Kartanegara	1	Unit	7.125.000.000			0		
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab. Kutai Kartanegara	1	Dokumen	200.000.000			0	Dokumen	400.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
1.02.02.3.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Kab. Kutai Kartanegara	100	Persen	-					
1.02.02.3.02.46	Pengelolaan Manajemen Puskesmas	Jumlah Dokumen hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas	Kab. Kutai Kartanegara	-	Dokumen	-					
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang Terlatih sesuai Kompetensinya	Kab. Kutai Kartanegara	80	Persen	2.620.000.000			85	Persen	1.750.000.000
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten /Kota	Jumlah Izin Praktik Tenaga Kesehatan yang diberikan	Kab. Kutai Kartanegara	1500	izin	750.000.000			1500	izin	350.000.000
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	2500	Dokumen	750.000.000			35	Dokumen	350.000.000
1.02.03.2.02	Perencanaan	Tersedianya dokumen	Kab. Kutai	80	persen				85	persen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan	Kartanegara			870.000.000					900.000.000
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	44	Dokumen	400.000.000			44	Dokumen	400.000.000
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kab. Kutai Kartanegara	54	Orang	370.000.000			44	Orang	500.000.000
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	1	Dokumen	100.000.000					
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	jumlah SDMK meningkat kompetensinya	Kab. Kutai Kartanegara	100	orang	1.000.000.000			50	orang	500.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kab. Kutai Kartanegara	400	Orang	1.000.000.000			50	Orang	500.000.000
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Terselenggaranya pelayanan perizinan , pengawasan dan pengendalian sediaan farmasi, alkes dan makanan minuman	Kab. Kutai Kartanegara	100	persen	893.500.000			100	persen	353.500.000
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memilki izin	Kab. Kutai Kartanegara	100	persen	200.000.000			100	persen	160.000.000
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta	Kab. Kutai Kartanegara	75	Dokumen	200.000.000			80	Dokumen	85.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisonal (UMOT)	Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisonal (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Kutai Kartanegara	0	Sarana	-			1	Sarana	10.000.000
1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Kutai Kartanegara	0	Sarana	-			40	Sarana	65.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	Obat Tradisonal (UMOT)	yang Memenuhi Komitmen Izin									
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terselenggaranya proses penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Kab. Kutai Kartanegara	15	sertifkat	105.000.000			15	sertifkat	105.000.000
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Kutai Kartanegara	280	Dokumen	105.000.000			60	Dokumen	105.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	Tangga										
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Kab. Kutai Kartanegara			250.000.000					
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab. Kutai Kartanegara	942	Dokumen	250.000.000					
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan		Kab. Kutai Kartanegara			250.000.000					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	Sentra Makanan Jajanan										
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kab. Kutai Kartanegara	253	Dokumen	250.000.000					
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Terselenggaranya pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Kab. Kutai Kartanegara	35	Persen	88.500.000			40	Persen	88.500.000
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam	Kab. Kutai Kartanegara	150	Unit	88.500.000			40	Unit	78.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	Pengawasan	rangka Tindak Lanjut Pengawasan									
1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Kutai Kartanegara	0	Dokumen	-			1	Dokumen	10.000.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Capaian RT-PHBS	Kab. Kutai Kartanegara	36	Persen	1.100.000.000			40	Persen	662.000.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Puskesmas dengan Desa Germas.	Kab. Kutai Kartanegara	50	Persen	350.000.000			60	Persen	250.000.000
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	105	Dokumen	350.000.000			2 kali	Dokumen	250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Puskesmas dengan Memanfaatan Media Cetak, Elektronik dan Media Sosial aktif	Kab. Kutai Kartanegara	55	Persen	300.000.000			60	Persen	260.000.000
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Kutai Kartanegara	155	Dokumen	300.000.000			11 JENIS	Dokumen	260.000.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Desa Siaga aktif dengan UKBM aktif	Kab. Kutai Kartanegara	36	Persen	450.000.000			40	Persen	152.000.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Kutai Kartanegara	36	Dokumen	450.000.000			32 PKM	Dokumen	152.000.000
						758.277.726.0					331.372.153.116

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH					26				

BAB V
PENUTUP

a. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan prioritas penbangunan bidang Kesehatan yang berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan percepatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Agenda Pembangunan SDG's (Sustainable Development Goals).

Dalam melaksanakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, terdapat beberapa isu penting yang perlu mendapatkan perhatian yaitu sebagai berikut:

1. Penurunan Angka Kematian Ibu , Angka Kematian Bayi dan Stunting
2. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, dimana masih tingginya kejadian penyakit menular seperti TB Paru, Demam berdarah, dan penyakit menular Iainnya yang harus dilakukan pengawasan secara Iebih baik sehingga dapat ditanggulangi dan diintervensi secara dini sehingga tidak menjadi wabah.
3. Perlunya peningkatan upaya promotif dan preventif kesehatan yang lebih maksimal dalam upaya mencegah agar masyarakat tidak mengalami kesakitan, karena upaya pengobatan penyakit akan membutuhkan dana yang sangat tinggi.
4. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih baik sehingga mutu pelayanan kesehatan dan cakupan pelayanan kesehatan dapat lebih ditingkatkan secara Iebih baik.
5. Peningkatan integrasi dalam Percepatan Penurunana Stunting.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 menjadi acuan dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan pada setiap bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi pondasi

bagi kesinambungan dan terintegrasinya pelaksanaan program – program pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan rencana kerja ini, berbagai program dan kegiatan yang telah dirumuskan akan dilaksanakan dengan konsisten oleh stakeholders sehingga target kinerja sebagai indikator pencapaian tujuan Dinas Kesehatan dapat terealisasi dan terlaksana secara optimal.

b. Kaidah Pelaksanaan

Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam RENJA Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan program pemerintah khususnya dalam bidang Kesehatan. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subjek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 dan RENJA-PD Tahun 2025, tanpa terkecuali dengan tetap menjaga konsistensi, integrasi, dan sinergitas dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan RENSTRA tahun 2021-2026.
2. RENJA Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan langkah awal penyusunan RAPBD sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 (hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara).
3. Dalam rangka koordinasi perencanaan guna mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, integrasi, sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan setiap kebijakan, program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 yang menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai

dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2025 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN/BLN/sumber dana lainnya) sebagai berikut:

a) Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2025, merupakan anggaran program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup);

b) Uraian tentang rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2025, merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya;

c) Uraian sebagaimana yang dimaksud butir di atas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, sebagai tugas pemerintah daerah, sebagai tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah provinsi dari pemerintah pusat, atau sebagai tugas pembantuan yang diterima pemerintah kabupaten dari pemerintah pusat; serta

d) Pemerintah daerah wajib menyampaikan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dari masing-masing Perangkat Daerah, yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah.

4. Dinas Kesehatan wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di RENJA Tahun 2025 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Upaya pengendalian dan pengawasan ini akan merevisi setiap kekurangan, kemudian mengakselerasi dan mengoptimalkan capaian positif kinerja pembangunan daerah.

5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subjek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

6. Kepala Dinas Kesehatan pada akhir tahun 2025 wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan,

maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan- peraturan lainnya.

c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 yaitu dengan menetapkan 5 Program, 22 Kegiatan dan 172 Sub Kegiatan dengan berpedoman pada Kepmendagri No 900.1.5.5-1317 Tahun 2023. Selain itu Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan untuk:

1. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2025;
2. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daeah (RKA/DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025;
3. Acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja, serta memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan rencana kebijakan dimana mendatang oleh jajaran pimpinan dan seluruh staf Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab di bidang kesehatan khususnya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2025. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya.

Selama realisasi pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

j.RENJA DINAS SOSIAL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi wargamasyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial, warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) danmasyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Untuk dapat memberikan pelayanankepada PMKS secara komprehensif dengan mengedepankan aspek efektifitas dan efisiensi, maka diperlukan sebuah dokumen perencanaan strategis.

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyelenggarakan urusan wajib sosial, sebagai upaya mendukung tercapainya masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera. Sejalan dengan tujuan tersebut, Dinas Sosial memiliki peran cukup strategis dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Isu penting untuk mencapai masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera yang menjadi kewenangan Dinas Sosial adalah peningkatan penanganan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk tahun 2025 disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025 dan selanjutnya dokumen perencanaan tersebut akan menjadi panduan dalam merencanakan kinerja tahunan yang akan disajikan dalam Rencana Kerja pada tahun berjalan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Bentuk Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian

sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian terdapat keterkaitan yang sangat erat antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upayamencapaitujuan bangsa dan amanat yang dituangkan dalam UUD 1945 yang kemudian diturunkan dalam beberapa aturan perundangandibawahnya. Landasan hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten / Kota Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 66);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyadang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 77);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 160);
22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 adalah :

a. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial ini dimaksudkan sebagai :
    1. Upaya Penyesuaian terhadap perkembangan keadaan dalam pelaksanaan Program Kegiatan yang telah disusun diawal Tahun Perencanaan, yang mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaanya pada tahun berjalan.
    2. Upaya pemenuhan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang belum terakomodir pada Rencana Kerja 2024 dan tambahan untuk kekurangan pembiayaan beberapa kegiatan yang bersifat mendesak.
    3. Upaya Penyesuaian rencana target capaian Renstra SKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial ini bertujuan:

1. Mengintegrasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dalam Rencana Strategis sebagai acuan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kebijakan dan program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.
2. Menyesuaikan rencana target capaian Renstra SKPD dengan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Menyediakan dokumen perencanaan yang lebih operasional baik dalam pelaksanaan maupun evaluasi pencapaian target yang ditentukan.
4. Terwujudnya koordinasi dan keterpaduan sinergis dalam pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial.

1.4 Sistematika Penulisan

Naskah Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegaradisusundalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Perubahan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA_PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Sosial memuat penjelasan terhadap hasil RENJA Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fumgsi Perangkat Daerah.

Pada Sub-bab ini menguraikan tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dan hal kritis terkait dengan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartaneagra, dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap capaian program

Nasional/Global, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun rencana

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Melalui Sub-bab ini berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil kebutuhan, penjelasan mengenai alas an proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan

Sub-bab ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dengan menyajikan penjelasan tentang proses usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, penjelasan kesesuaian usulan tersebut dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada Sub-bab ini memuat berisikan tentang telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja_PD

Pada Sub-bab ini memuat perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara yang dikaitkan dengan Sasaran target kinerja Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program danKegiatan

Pada bab ini menyajikan table rencana kerja dan pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2024

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun lalu dan capaian Renstra PD

Evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2023 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Dinas Sosial tahun 2023 melalui analisis terhadap kinerja output dan kinerja keuangan. Demikian juga untuk pelaksanaan tahun berjalan 2024, pencapaian kinerja output akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas. Adapun Evaluasi terhadap Capaian Program Kegiatan tahun 2023 sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatanyang tidak memenuhi target kinerjahasil/keluaran yang direncanakan;

   Semua program / kegiatan tercapai sesuai target kinerja meskipun untuk Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan capaiannya realisasi output dan anggarannya rendah, namun program yang berisikan paket pekerjaan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan ke tempat asalnya ini pelaksanaannya bersifat kasuistik dan pada tahun 2023 di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak ada sasaran yang harus mendapatkan pelayanan tersebut.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerjahasil/keluaran yang direncanakan;

   Program nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk bidang sosial terdapat 7 program yang meliputi : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Program Pemberdayaan Sosial; Program Penanganan Warga Negera Migran Korban Tindak Kekerajan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanangan Bencana serta Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Kegiatan : Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Target 4 Dokumen Realisasi 4 Dokumen (100%)
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Target 12 Laporan Realisasi 12 Laporan (100%)

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Target 1.106 Orang/Bulan Realisasi 1.125 Orang/Bulan (101,7%)
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Target 12 Laporan Realiasi 12 Laporan (100%) Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Target 4 Laporan Realisasi 4 Laporan (100%)
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Target 1 Laporan Realisasi 1 Laporan (100%)

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pendataan dan Pengolahan Data Kepegawaian Target 2 Dokumen Realisasi 2 Dokumen (100%)
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Target 163 Paket Realisasi 163 Paket (100%)

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Target 50 Paket Realisasi 50 Paket (100%)
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Target 9 Paket Realisasi 9 Paket (100%)
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Taget 8 Paket Realisasi 8 Paket (100%)
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target 7 Paket Realisasi 7 Paket (100%)

5. Penyediaan Bahan/Material Target 7 Paket Realisasi 7 Paket (100%)
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Target 300 Paket Realisasi 250 Paket (83%)
7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Target 301 Dokumen Realisasi 201 Dokumen (67%)
8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD Target 2 Dokumen Realisasi 2 Dokumen (100%)

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Target 4 Unit Realisasi 4 Unit (100%)
2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Target 101 Unit Realisasi 100 Unit (99%)

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target 5 Laporan Realisasi 5 Laporan (100%)
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target 12 Laporan Realisasi 12 Laporan (100%)
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Target 12 Laporan Realisasi 12 Laporan (100%)

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Target 32 Unit Realisasi 30 Unit (94%)
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Target 9 Unit Realisasi 9 Unit (100%)
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Target 58 Unit

Realisasi 49 Unit (84%)

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Target 4 Unit Realisasi 3 Unit (75%)
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Target 6 Unit Realisasi 5 Unit (83%)

b. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan : Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Target 1 Dokumen Realisasi 1 Dokumen (100%)

Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Target 50 Orang Realisasi 50 Orang (100%)
2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Target 20 Orang Realisasi 20 Orang (100%)
3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Target 237 Lembaga Realisasi 350 Lembaga (148%)
4. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Target 5 Sertifkat Realisasi 3 Sertifikat (60%)

c. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Kegiatan : Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak

Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Target 10 Orang Realisasi Tida Ada (0%) karena pelayanan ini bersifat kasuistik berdasarkan kejadian yang ada.

d. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Permakanan Target 852 Orang Realisasi 852 Orang (100%).
2. Penyediaan Sandang Target 200 Orang Realisasi 307 Orang (153%).
3. Penyediaan Alat Bantu Target 230 Orang Realisasi 230 Orang (100%)
4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Target 100 Orang Realisasi 101 Orang (101%)
5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Target 100 Orang Realisasi 346 Orang (346 %).
6. Pemberian Layanan Rujukan Target 1000 Orang Realisasi 1000 Orang (100%)

Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Sub Kegiatan :

1. Pemberian Layanan Kedaruratan Target 50 Orang Realisasi 116 Orang (232%).
2. Penyediaan Permanan Target 200 Orang Realisasi 200 Orang (100%)
3. Penyediaan Sandang Target 200 Orang Realisasi 200 Orang (100%)
4. Penyediaan Alat Bantu Target 20 Orang Realisasi 20 Orang (100%)
5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Target 100 Orang Realisasi 46 Orang (46%)

6. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Target 100 Orang Realisasi 46 Orang (46%).
7. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Target 2 Dokumen Realisasi 2 Dokumen (100%).

e. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan : Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

Sub Kegiatan :

1. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Target 25 Orang Realisasi 25 Orang (100%).

Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Target 175.000 Orang Realisasi 175.000 Orang (100%).
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Target 40.919 Keluarga Realisasi 40.919 Keluarga (100%).
3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Target 2.390 KK Realisasi 1.377 KK (58%)
4. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Target 336 Orang Realisasi 340 Orang (101%)

f. Program Penanganan Bencana

Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Makanan Target 3.000 KK Realisasi 3.000 KK (100%)
2. Penyediaan Sandang Target 3.000 KK Realisasi 3.000 KK (100%)

Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Target 4 Desa Realisasi 4 Desa (100%).

2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Target 20 Orang Realisasi 20 Orang (100%).

g. Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan

Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Target 2 Dokumen Realisasi 2 Dokumen (100%)
2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Target 2 Makam Realisasi 2 Makam (100%)

Berdasarkan hasil rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja_PD Tahun 2024 hingga semester pertama secara ringkas dapat dilihat pada tabelT-C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah danPencapaian Renstra

Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Lembar : 1

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatans/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target program dankegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD	
									Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84	83,48	79	92,45	117,03	81	85,00	110,06

					KABUPATEN/KOTA									
1	06	01	2, 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa n dan Pengendali an	88	34	25	25	100,00	6	65	73,86
1	06	01	2, 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/ Semesteran SKPD	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
1	06	01	2, 03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaa n kebutuhan barangmilik daerah SKPD	26	4	4	4	100,00	4	12	46,15
1	06	01	2, 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial	20	10	2	2	100,00	2	14	70,00
1	06	01	2, 06		Administrasi Umum Perangkat	Terlaksana nya	44	16	8	8	100,00	8	32	72,73

					Daerah	Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial								
1	06	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	50	25	25	100,00	20	95	95,00
1	06	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135	54	12	12	100,00	12	78	57,78
1	06	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah / Asset pada Dinas Sosial	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Lembar : 2

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatans/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target program dankegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD	
									Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	94	86,97	84	93,3	111,07	90	90	95,74

1	06	02	2,02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengetahuan lembaga atau perorangan dalam tata cara penyelenggaraan undian dan pengumpulan sumbangan	250	100	50	50	100,00	50	200	80,00
1	06	02	2,03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	88	86,97	84	93,3	111,07	90	90	102,27
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh fasilitas pemulangan	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00

1	06	03	2,01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Korban Tindak Kekerasan yang terlayani	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Lembar : 3

Kode					Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatans/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target program dankegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD	
									Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjutusia terlantar dan gelandangan pengemis	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00

						yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)								
1	06	04	2,01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS di luar panti	6907	2252	1468	1468	100,00	1250	4970	71,96
1	06	04	2,02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	3452	1240	645	645	100,00	695	2580	75,33

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Lembar : 4

Kode					Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatans/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target program dankegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD	
									Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	89,59	100	89,59	89,59	100	93,06	93,06

1	06	05	2,01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terpeliharanya anak-anak terlantar	25	7	25	25	100,00	25	25	100,00
1	06	05	2,02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
1	06	06	2,01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terlayani	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00

1	06	06	2,02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksanany a Kampung Siaga Bencana	20	4	4	4	100,00	4	4	20,00
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMPyang dikelola	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
1	06	07	2,01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran umum capaian indikator kinerja kunci pelaksana urusan wajib Bidang Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang Sosial.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pelayanan kesejahteraan sosial saat ini masih akan mendapatkan tantangan dimasa yang akan datang. Tantangan tersebut berasal dari kecenderungan berkembangnya jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya aparatur yang berlatarbelakang pendidikan profesi pekerjaan sosial dan ilmu kesejahteraan sosial.Hal ini dapat diantisipasi dengancara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pencapaian kinerja pelayanan DinasSosial secara ringkas dapat dilihat pada tabel T-C.30 berikut ini :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas SosialKabupaten Kutai Kartanegara

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA-PD					REALISASI		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja		Nilai SAKIP	78,00	79,00	81,00	82,00	84,00	83,48	92,45	81,00	82,00	
2	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (Indikator SPM)	SPM	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnyadi luar panti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,63	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase korban bencana alam dansosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	SPM	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan Dinas Sosial dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara setidaknya tergambar dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Urusan Wajib Sosial. Berdasarkan dokumen tersebut kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial tergambar dari ketersediaan sarana sosial, persentasi PMKS yang ditanganidan diberikan bantuan sosial.

Indikator persentasi penanganan PMKS di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2022. Angka ini dihitung dari jumlah keseluruhan PMKS yangada dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ditangani, baik melalui pola bimbingan sosial dan pemberian bantuan sosial. Pada tahun 2022 sejumlah 97,04 % PMKS menerima pelayanan, angka ini meningkat menjadi 98,72 %pada tahun 2023. Data ini menunjukkan bahwa PMKS di Kabupaten Kutai Kartanegara berhasil dilayani oleh Dinas Sosial dengan signifikan. Untuk target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial sebesar 100% dengan kelompok layanan bagi Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantan, Gelandangan Pengemis serta Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial telah tercapai 100 %.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugasdan fungsi OPD

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tergambar dari pelaksanaan tugas setiap bidang. Untuk mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dapat dilakukan melalui identifikasi permasalahan tabel sebagai berikut :

Tabel

Identifikasi Permasalahan Pelayanan

Aspek Kajian	Permasalahan
Pemutakhiran Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.	a. Belum tersedia aturan hukum lokal yang mengatur kriteria kemiskinan yang berbasis pada kearifan local. b. Kurangnya tenaga terampil aparatur di Desa dan Kelurahan dalam proses pemutakhiran Data. c. Masih tingginya subyektifitas petugas pengolah data di kelurahan maupun desa dalam melakukan verifikasi dan validasi data. d. Tingkta akurasi data yang masihrendah. e. Akses internet yang belum tersedia baik dibeberapa wilayah.
Bantuan stimulan bagifakir miskin dan pendampinganya.	a. Sarana dan prasarana bantuan stimulantdan pendampinganya bagi fakir miskin belum tersediaanggarnya. b. Belum tersedia tenaga funsinoalpendamping sosial.
Sarana dan prasarana sosial (panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi)	a. Sarana prasarana panti sosial kurangmemadai b. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas dalam melaksanakan standar pelayanan panti c. Belum tersedia panti rehabilitasi bagi ABH d. Belum tersedia pekerja sosialfungsional
Pelayanan kesejahteraan sosialbagi korban bencana selama masa tanggap darurat	a. Kuantitas dan kualitas TAGANA masihkurang b. Kendaraan lapangan untuk penanganan bencana dalam konsisirusak.
Aspek Kajian	Permasalahan
Pelayanan sosial anak terlantardiluar panti	a. Kurangnya tenaga pendamping sosialuntuk pelayanan diluar panti b. Sarana prasarana penunjang pelayanan belum tersedia
Pelayanan rehabilitasi sosial bagipenyandang cacat dan trauma	a. Kurangnya instruktur vokasional bagi penyandang cacat dan trauma b. belum adanya perda yang mengaturtentang pelayanan sosial bagi penyandang cacat c. sarana prasarana rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat masih terbatas

Pelayanan kesejahteraansosialmelalui UPT	a. Keterbatasan sarana prasarana sehingga daya tampung sangat terbatas b. Kurangnya petugas yang memiliki bekalketrampilan teknis pelayanankesejahteraan anak melalui panti c. Kurangnya pengetahuan petugas tentang standar pelayanan lembagakesejahteraan sosial
PSKS yang berpartisipasi dalampenyelenggaraan kesejahteraan sosial	a. Jenis PSKS yang ada sangat terbatas b. Kurang intensifnya pembinaanterhadap TKSM

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut diketahui adanya beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial dalam mewujudkan beberapa indikator kinerja daerah yang tertuang dalam RPJMD. Beberapa permasalahan tersebut ada yang saling memeiliki keterkaitan dan kesamaan. Pada dasarnya permasalahan yang dihadapi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Perlunya Updating data pemerlu pelayanan terutama Basis Data Terpaduyang saat ini dijadikan acuan mutlak dalam melaksanakan pelayanan.
2. kurangnya kualitas SDM aparatur pelaksana pelayanan kesejahteraansosial
3. kurang memadainya sarana prasarana penunjang pelayanan
4. kurang tersedianya regulasi daerah yang dapat menjadi pedoman secara teknis dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS.

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi dan Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih merupakan pedoman sekaligus sasaran yang ingin dituju dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebelum program yang ditujukan untuk mencapai misi dilaksanakan, dilakukan analisaterhadap permasalahan dan factor-faktor yang mungkin dapat menghambat atau mendukung pelaksanaan program tersebut. Telaahterhadap kemungkinan adanya faktor penghambat ataupun pendukung pelaksanaan program ditampilkan dalam tabel berikut ini;

Tabel ;

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara YangSejahtera dan Berbahagia				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDHterpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya			
	Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial	Akurasi Basis Data Terpadu yang masih rendah Karen proses verivali sedangberjalan	Luas wilayah, banyaknya data yang harus diverivali, jaringaninternet, SDM verivali data	Adanya dukungan program dari Kemensos dan dukungan KDH dalam prosesverivali data.
		Minimnya program komplementaritas bagi penerima manfaat ProgramPusat	Transisi menuju bantuan nontunai sering terkendala system perbank-kan	Pendampingan mulai intensifdilaksakan dan Sekaligus dalamrangka mensosialisasikan rencana pemenuhan program komplementaritas
	Program : RehabilitasiSosial bagi PMKS	Belum tersedianya panti pantirehabilitasi PMKS	Kuota Panti milik Provinsi terbatas	Upaya dilakukan melalui rehabilitasi berbasis masyarakat
	Program: Pemberdayaan Sosial	Belum optimalnyaproses pemberdayaan PSKS	Kekosongan Pejabat pemangku	Adanya pendamping program yang diluncurkan kementrian Sosial RI
		Perubahan SPM	Tanggung jawab pengelolaan panti ada pada pemerintah provinsi	Dalam masa transisi kabupaten masih diperkenankan melakukan pelayanan

Memperhatikan beberapa program yang disajikan untuk mencapai misi yangberhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, perlu dilakukan beberapa penajaman terhadap indikator kinerja (outcome) dan program yang disajikan. Selain melakukan penajaman terhadap indikator kinerja dan mempertimbangkan ulang untuk menghapus nama beberapa program, dipandang perlu juga untuk Program Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Program Kementrian Sosial RI agar terjadi pula keselarasan antara program pemerintah pusat dan daerah. program baru didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024. Adapun program yang dipandang penting dalam upayamenyelaraskan dengan Rencana Kerja Daerah adalah :

1. Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

   Mengacu pada Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditujukan bagi PMKS yang termasuk dalam katagori kelompok yang memerlukan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dengan pendekatan persuasive, motovatif, dan koersif baik melalui keluarga, masyarakat, maupun panti sosial. SPM mengatur kewajiban pemerintah daerah kabupaten/ kota melaksanakan penguatan kelembagaan, infrastruktur, SDM dan pembiayaan untuk penyelnggaraan rehabilitasi sosial dasarluar panti bagi anak terlantar, Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis terlantar.

2. Program Perlindungan dan jaminan sosial.

   Program ini menitik beratkan sasaranya pada peningkatan kemandirian keluarga miskin dan kelompok rentan dalam mengakses pemenuhan kebutuhan dasaranya melalui

perlindungan sosial yang komprehensif, indikator sasaran program ini diantaranya adalah presentase keluarga miskindan rentan yang meningkat kemandirianya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar dan presentase korban bencana dan kelompokrentan.

3. Program Pemberdayaan Sosial

   Program ini penting untuk untuk dilaksanakan sebagai upaya pemberdayaanPotensi Sumber Kesejahteraan Soial dalam upaya penanggulanagn

   Kemiskinan Di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Program ini mencoba memaksimalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan arah dan Kebijakan Kemntrian Sosial Republik Indonesia. Sasaran program ini adalah Lembaga Swadaya masyarakat yang bergerak dalam penanganan masalah sosial baik organisasi maupun perorangan.

4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

   Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan masalah sosial yang sifatnya sangat dinamis. Perkembangan masalah sosial terjadi seiring dengan perkembangan kondisi masyarakat. Tantangan utama yang akan dialami oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengembangan pelayanan adalah kaderisasi sumberdaya manusia. Mulai tahun 2021 sampai tahun 2026 akan banyak pegawai Dinas Sosial yang memasuki usia pensiun. Mereka terdiridari pegawai yang berlatar belakangpendidikan ilmu kesejahteraan sosial dan pegawai yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial sejak awal bertugas sebagai pegawai.

   Tantangan yang diahadapi ini disisi lain merupakan peluang bagi Dinas Sosial untuk mengembangkan pelayanan. Pensiunnya pegawai senior ini memberikan peluang bagi pegawai yang ada untuk mengembangkan diri melalui pendidikan formal maupun diklat fungsional. Peluang lain yang dimiliki oleh Dinas Sosial

adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebijakan ini tentunya dilaksanakan melalui pelaksanaan program-program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut sebagian merupakantugas fungsi Dinas Sosial.

5. Formulasi isi-isu penting berupa rekomendasi dan cacatan yang strategis

   Memperhatikan beberapa permasalahan yang dialami Dinas Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dapat dikelompokkan kedalam beberapa kelompok. Kelompok permasalahan ini merupakan masalah strategis yang merupakan isu strategis dalam penyelenggaraankesejahteraan sosial. Beberapaisu strategis tersebut meliputi :

   1. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial
   2. Keterbatasan sarana prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraansosial.
   3. Kecenderungan peningkatan jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan social
   4. Kurangnya sinergi stakeholders dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial

      Strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Bupati Kutai Kartanegara, ditetapkan melalui serangkaiankebijakan dan program. Strategi ini sejalan dengan strategi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, yang ditetapkan sebagaiupaya untuk mewujudkan Visi dan Misi KUKAR IDAMAN. Adapun kebijakan dan program tersebut sebagai berikut :

      1. Kebijakan : Meningkatkan akses keluarga miskin untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.

         Kebijakan ini dilaksanakan melalui program prioritas berikut ini :

a. Program Pembinaan Anak Terlantar

   Anak adalah generasi penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya permasalahan pada anak dapat berdampak pada masa depan anak yang juga masa depan bangsa. Pembinaan terhadap anak terlantar dilakukan agar anak dapat menjalankan tugas perkembangannya dengan baik, sehingga menjadi manusia dewasa yang sejahtera. Pembinaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak dan mempersiapkan anak memasuki masa dewasa.

b. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

c. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)

2. Kebijakan : Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat. Kebijakan ini dilaksanakan melalui program prioritas :

   a. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

      Didalam masyarakat sudah terdapat upaya-upaya yang melembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Upaya ini ada yang dilaksanakan dalam lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Pemberdayaan dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kualitas manajemen pelayanan yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

   b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Sistem Pelayanan

   c. Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Sosial

d. Program Pelestarian Nilai-nilai Kejuangan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 maka dapat dijelaskan bahwa RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Selanjutnya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025. Adapun dalam penyusunannya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang terkait seperti RPJM Nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RPJMD dan RKP Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkankan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang memuat prioritasprogram dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD.

Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah terciptanya sinkronisasi dan integrasi Program/Kegiatan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana menyebutkan bahwa program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak- hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang di rencanakan. Memperhatikan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi serta berdasarkan identifikasi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan perkiraan kondisi Tahun 2025 serta prospek Tahun 2025 maka

prioritas dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 di tetapkan sebagai berikut :

Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				**23.762.076.495**				**40.454.496.674**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 Nilai	**10.823.476.495**		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 Nilai	**17.317.196.674**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tercapainya Nilai SAKIP	82 Nilai	**175.000.000**		Tercapainya Nilai SAKIP	82 Nilai	**1.000.000.000**	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	250.000.000	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	75.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	450.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	50.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	0	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	8 Laporan	150.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	**9.332.385.997**		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem	22 Laporan	**11.708.906.176**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/Bulan	9.192.385.997	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1106 Orang/Bulan	11.293.906.176	P1 = Wajib dan Mengikat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	250.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	12 Laporan	140.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan	12 Laporan	140.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	25.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	4 Laporan	**52.800.000**		Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	4 Laporan	**205.000.000**	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						25.000.000	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						50.000.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	52.800.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	30.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Seluruh Kecamatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	Kab. Kutai Kartanegara, Seluruh Kecamatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial	**2 Dokumen**	**40.000.000**		Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial	2 Dokumen	**40.000.000**	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	170 Paket	0	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	40.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	40.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	0	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial	8 Layanan	**254.341.800**		Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial	8 Layanan	**394.341.800**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5.110.200	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5.110.200	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	59.247.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	59.247.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Jenis	30.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Jenis	19.986.600	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	19.986.600	
Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	29.998.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	29.998.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Orang	60.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	200 Laporan	200.000.000	P1 = Wajib dan Mengikat

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	34.222.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	34.222.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	0	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3.000.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	41 Unit	0	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41 Unit	0	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	88 Persen	**700.000.000**		Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	88 Persen	**6.170.000.000**	
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya pengetahuan lembaga atau perorangan dalam tata cara penyelenggaraan undian dan pengumpulan sumbangan	50 Orang	**75.000.000**		Meningkatnya pengetahuan lembaga atau perorangan dalam tata cara penyelenggaraan undian dan pengumpulan sumbangan	50 Orang	**75.000.000**	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	75.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	75.000.000	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PSKS yang dikembangkan	100 Persen	**625.000.000**		Persentase PSKS yang dikembangkan	100 Persen	**6.095.000.000**	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	125.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	400.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	400.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Lembaga	250.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	240 Lembaga	5.245.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	50.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh fasilitas pemulangan	100 Persen	**50.000.000**		Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh fasilitas pemulangan	100 Persen	**50.000.000**	
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Persentase Korban Tindak Kekerasan yang terlayani	100 Persen	**50.000.000**		Persentase Korban Tindak Kekerasan yang terlayani	100 Persen	**50.000.000**	
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100 Persen	**1.990.000.000**		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100 Persen	**5.508.500.000**	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS di luar panti	2109 Orang	**1.300.000.000**		Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS di luar panti	2109 Orang	**4.818.500.000**	
Penyediaan Permakanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	600.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai	820 Orang	3.508.500.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN ; Penanggulangan Kemiskinan

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
Penyediaan Sandang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	150.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN ; Penanggulangan Kemiskinan
Penyediaan Alat Bantu	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	525.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN ; Penanggulangan Kemiskinan
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	150.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	310.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal
Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	75.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal
Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	595 Orang	**690.000.000**		Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS bukan korban	595 Orang	**690.000.000**	
Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	75.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
Penyediaan Permakanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi	200 Orang	200.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal
Penyediaan Sandang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	80.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	80.000.000	
Penyediaan Alat Bantu	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	60.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	60.000.000	P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000	
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	75.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam	2 Dokumen	75.000.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 Persen 85 Persen	**9.373.600.000**		Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial Presentase PMKS yang	100 Persen 85 Persen	**7.033.800.000**	
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Terpeliharanya anak-anak terlantar	25 Orang	**300.000.000**		Terpeliharanya anak-anak terlantar	25 Orang	**1.000.000.000**	
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	300.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	1.000.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN ; Penanggulangan Kemiskinan

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	100 Persen	**9.073.600.000**		Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan	100 Persen	**6.033.800.000**	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2 Dokumen	380.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	175209 Orang	380.000.000	P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	2 Dokumen	500.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	65403 Keluarga	500.000.000	P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Keluarga	7.943.600.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Keluarga	4.903.800.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN ; Penanggulangan Kemiskinan ; KP_Stunting
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 KK	250.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	250.000.000	P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN ; Penanggulangan Kemiskinan ; KP_Stunting
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 Persen	**625.000.000**		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 Persen	**2.475.000.000**	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terlayani	**100 Persen**	**425.000.000**		Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terlayani	100 Persen	**1.250.000.000**	
Penyediaan Makanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	300.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	600.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
Penyediaan Sandang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	125.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	1500 Orang	300.000.000	P2 = Standar Pelayanan Minimal
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi						Jumlah Penerima Bantuan Penyediaan Tempat Penampungan dalam masa tanggap darurat bencana	100 Orang	200.000.000	
Pelayanan Dukungan Psikososial						Jumlah Penerima Bantuan Dukungan Psikososial pasca masa tanggap darurat bencana	50 Orang	150.000.000	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Terlaksananya Kampung Siaga Bencana	4 Desa	**200.000.000**		Terlaksananya Kampung Siaga Bencana	12 Desa	**1.225.000.000**	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Badak, Samboja	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Desa	100.000.000	Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Badak, Samboja	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Desa	750.000.000	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	25 Orang	475.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase TMP yang dikelola	100 Persen	**200.000.000**		Persentase TMP yang dikelola	100 Persen	**1.900.000.000**	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100 Persen	**200.000.000**		Persentase Taman Makam Pahlawan yang	100 Persen	**1.900.000.000**	
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tenggarong, Sanga-Sanga	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100.000.000	Tenggarong, Sanga-Sanga	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	2 Dokumen	1.500.000.000	Mandatory Spending Infra Struktur
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tenggarong, Sanga-Sanga	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam	100.000.000	Tenggarong, Sanga-Sanga	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada	2 Makam	400.000.000	
TOTAL				**23.762.076.495**				**40.454.496.674**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil kajian pengumpulan informasi dilapangan dan pengamatan maka disusun dan diusulkan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 meliputi 7 (Tujuh) program yang dilaksanakan dalam 18 (Delapan Belas) kegiatan, dan 61 (Enam Puluh Satu) sub kegiatan. Adapun target sasaran dan target output yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	
2	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Data	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	3 Dokumen	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	6 Laporan	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	8 Laporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1106 orang/ Bulan	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	8 Laporan	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semeste SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Laporan	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				

s

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	
2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Laporan	
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan LaporanBarang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah padaSKPD	Kab. Kutai Kartanegara,Semua Kecamatan,	4 Laporan	
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerahpada	Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan, SemuaKelurahan	1 Laporan	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
		SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	170 Paket	
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Dokumen	
3	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti BimbinganTeknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	15 Orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	5 Paket	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang DisediakanJumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	20 Paket	
3	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang DisediakanBarang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Paket	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong, Melayu	10 Paket	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Melayu	4 Paket	
5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Materi al yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Paket	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,	200 Laporan	
7	Penatausahaan Arsip Dinamis padaSKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis padaSKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	200 Dokumen	
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik padaSKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebelyang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	5 Paket	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	10 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong, Melayu	1 Laporan	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong, Melayu	12 Laporan	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n	Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong, Melayu	12 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong, Melayu	33 Unit	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong, Melayu	5 Unit	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong, Melayu	12 Unit	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
		yang Dipelihara			
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong, Melayu	2 Unit	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong, Melayu	41 Unit	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1	Koordinasi dan Sinkronisasi PenerbitanIzin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danSinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	1 Dokumen	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas PekerjaSosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	20 Orang	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan SosialKecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	20 Orang	
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosialyang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	240 Lembaga	
4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	5 Sertifikat	
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan keDesa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dariTitik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Keluraha n Asal	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	50 Orang	
		Rencana Tahun 2025			

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
		Kewenangan Kabupaten/Kota			
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orangyang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	820 Orang	
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	200 Orang	
3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu danAlat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	50 Orang	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
4	Pemberian Pelayanan ReunifikasiKeluarga	Jumlah Orangyang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	50 Orang	
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,Mental, Spiritualdan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	100 Orang	
6	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orangyang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	50 Orang	
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
7	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	100 Orang	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				
1	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orangyang Mendapatkan Pelayanan Kedarurata n Kewenanga	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	75 Orang	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
		n Kabupaten/Kota			
2	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orangyang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	200 Orang	
3	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	200 Orang	
4	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu danAlat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	20 Orang	
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,Mental, Spiritualdan Sosial Kewenangan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	100 Orang	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
		Kabupaten/Kota			
6	Pemberian Pelayanan ReunifikasiKeluarga	Jumlah Orangyang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	100 Orang	
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah DokumenHasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Dokumen	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak- Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	25 Orang	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
1	Pendataan Fakir Miskin CakupanDaerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir MiskinCakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	175209 Orang	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
		yang Didata			
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	65403 KK	
3	Fasilitasi Bantuan Sosial KesejahteraanKeluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat(KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	1500 KK	
4	Fasilitasi Bantuan PengembanganEkonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	75 Orang	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				
1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1Hari dalam MasaTanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	1500 Orang	
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orangyang Mendapatkan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	1500 Orang	
		Rencana Tahun 2025			

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
		Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penerima Bantuan Penyediaan Tempat Penampungan dalam masa tanggap darurat bencana	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	100 Orang	
4	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Penerima Bantuan Dukungan Psikososial pascamasa tanggap darurat bencana	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	100 Orang	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan	Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Badak, Samboja, Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, MuaraWis, Muara Muntai, Muara Kaman, Sebulu	12 Desa/ Keluraha n	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
		Kabupaten/Kota			
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan TarunaSiaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	25 Orang	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				
1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah DokumenHasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TamanMakam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tenggarong, Sanga-Sanga	2 Dokumen	
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharann ya pada Taman	Tenggarong, Sanga-Sanga	2 Makam	
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Keterangan
		Makam Pahlawan Kabupaten/Kot a			

Berdasarkan proses perencanaan yang telah dilaksanakan terdapat beberapa usulan dari masyarakat dan pokok-pokok pikiran pihak legislatif yang terkait dalam rangka peningkatkan pelayanan urusan bidang sosial yang telah disampaikan melalui aplikasi SistemInformasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk tahun anggaran 2025 yaitu :

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	Sarana Prasarana Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (Karang Taruna, Panti Asuhan, Panti Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan,)	Pengadaan Alat Pertukangan Gergaji Listrik Karang taruna Kel. Panji 1 unit	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jl. Stadion Timur II Kel.Panji, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Peralatan Tukang Gergaji Listrik	1 Unit	Belum dilengkapi proposal
2	Sarana Prasarana Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (Karang Taruna, Panti Asuhan, Panti Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan,)	Pengadaan Alat Pertukangan Karang taruna Kel. Panji	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jl. Stadion Timur II Kel.Panji, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Peralatan Tukang	1 Paket	Belum dilengkapi proposal
3	Sarana Prasarana Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (Karang Taruna, Panti Asuhan, Panti Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan,)	Anggota Karang Taruna Sangaji kel. Baru Belum Memiliki Pakaian untuk kegiatan di lapangan (PENGADAAN PAKAIAN KAOS KARANG TARUNA SANGAJI KEL. BARU)	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jl. Aji Imbut RT.01 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	Pakaian Karang Taruna	1 Paket	Belum dilengkapi proposal
4	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Kurangnya pemahaman pengelolaan pariwisata	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Jl.Habib Tunggang Parangan RT 004 , Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu,	Jumlah Anggota Karang Taruna yang mendapatkan	-	Belum dilengkapi proposal

			Kewenangan Kabupaten/Kota	Jembayan Tengah	pelatihan pengelolaan objek wisata		
5	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Mata pencaharian Penurus Karang Taruna dan Anggota, di Desa belum optimalnya peranan karang tarun dan kelompok lainnya di desa, pendampinyan, penyuluhan , di desa sarana dan prasaran, minim pengatahuan masyarakat tentang PSKS. keterabatasan Informasi	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dusun Mekar Sari Dan Dusun Mekar Baru, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Kupang Baru	Jumlah Anggota Karang Taruna yang mendapatkan sosialisasi peran dan fungsi karang taruna	-	Belum dilengkapi proposal
6	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Pengadaan Bantuan Karang Taruna berupa : Pakaian seragam Karang Taruna, Bantuan Barang untuk Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna, Pengadaan Sarana Prasarana Panti Asuhan berupa Meubelair, Peralatan Tidur, ATK (komputer dll), Pengadaan Sarana pendukung Taruna Siaga Bencana berupa alat pemadam ringan, pakaian seragam, Alat Komunikasi (HT), Pakaian Seragam Pekerja Sosial Masyarakat	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa Kota Bangun I, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Kota Bangun I	Jumlah Sarana dan Prasarana Karang Taruna	-	Belum dilengkapi proposal
7	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan	Pengadaan seragam lapangan untuk Karang	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber	Salo Palai RT 02, Kab. Kutai	Pakaian Seragam Karang	-	Belum dilengkapi

	Sosial (PSKS)	Taruna	Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kartanegara, Muara Badak, Salo Palai	Taruna		proposal
8	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Perlu adanya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa Loa Duri Ulu, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu	Pakaian Seragam Karang Taruna	-	Belum dilengkapi proposal
9	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Permohonan Bantuan Tandon Air 1.200 Liter Desa Liang Ulu	Tidak Ada Sub Kegiatan pada Dinas Sosial yang relevan terhadap permohonan	Desa Liang Ulu, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang Ulu			Tidak Ada Sub Kegiatan pada Dinas Sosial yang relevan terhadap permohonan
10	Fasilitasi sarana prasarana desa	Di Desa Muara Muntai Ulu masih banyak terdapat rumah yang tidak layak huni	Tidak Ada Sub Kegiatan pada Dinas Sosial yang relevan terhadap permohonan	RT. 001 s.d. RT. 012, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ulu			Tidak Ada Sub Kegiatan pada Dinas Sosial yang relevan terhadap permohonan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diberikan kewenangan melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang sosial. Pelaksanaan kewenangan tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal. Salah satu lingkungan eksternal yang perlu diperhatikan adalah sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 diperoleh infomasi tabel sebagai berikut :

Tabel ;

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemensos	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Menurunkan jumlah fakir miskin,kelompok rentan dan PMKS lainnya sebesar 1 (satu) persen dari target nasional pada tahun 2019	1. Sumber data yang akan dijadikan basis data belum tersedia denganmudah dan cepat 2. Koordinasi dengan instansi penyediadata belum berjalan dengan baik, karena adanya pembatasan kewenangan	1. Belum terintegrasinya aplikasi pengolah dan penyedia data PMKS denganbasis data kemiskinan 2. Kurangnya kapasitas SDM dalam pengelolaanbasis data kemiskinan dan PMKS	Memberikan peluang kerjasama dengan instansi penyedia datauntuk meningkatkan kualitas basis data dalam mendukung pencapaian sasaran

2	Pengembangan Kapasitas sumberdaya manusia (SDM) dan kelembagaan kesejahteraan sosial(LKS) dalampenyelenggaraan kesejahteraan sosial	1. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pendamping dan pembimbingLKS 2. Kerjasama dengan BBPPKSdalam pengembangan kapasitas SDM belum berjalan dengan baik		Menjadi faktor pemicu dalam rangka meningkatkan kerjasama dalam pengembangan kapasitas SDMdan kelembagaan kesejahteraan sosial

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur diperoleh informasi tabel sebagai berikut :

Tabel ;
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
berdasarkan Sasaran Renstra Dinsos Prov Kalimatan Timur
Tahun 2019-2024

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinsos Prov Kaltim	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraa n sosial	Dimensi kualitas hidup yang sangat luas sehingga perlu diturunkan secaralebih khusus untuk memudahkan penanganan	Tidak adanya informasi yang tegas tentang berapa kontribusiyang diharapkandari Kabupaten/Kota untuk mencapai target sasaran tersebut	
2	Meningkatka npotensi sosial penyandang masalah kesejahteraa nsosial (PMKS)	Upaya peningkatan potensi sosial PMKS masih dipahami dengan sangat sederhanadan terbatas	PMKS sangat mengharapkan upaya pemberdayaan yang bersifat instan, bukan pemberdayaan yang sebenarnyamerupakan proses yang cenderung Panjang	Kebijakan Kepala Daerahuntuk pemberdayaan masyarakat sangat tinggi
3	Meningkatkan kapasitas potensisumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	1. PSKS terutamaTKSM yang jumlahnya palingbanyak, kondisinya banyak yang sdh tidak aktif lagi 2. TKSM yang ada sudah banyak yang memasukiusialanjut 3. PSKS yang masihpotensial jumlahnya sangat terbatas dan sebarannya cukup jauh	Pola pembinaandan pemberian wewenang yngkurang jelas terutama bagi TKSM	Adanya kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, memerlukan partisipasi aktif dari PSKS

4	Meningkatkan akuntabilitaskinerja SKPD	1. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur 2. Banyaknya aturan penyelenggaraan pemerintahanyang seringkali membingungka n dalam pelaksanaanny a 3. Terbatasnya sarana prasarana penunjang kinerja SKPD	1. Penempatan SDM Aparaturyang tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang 2. Tidak tersedianya petunjuk tehnis operasional yang jelas dan mudah dioperasikan	Kebijakan Kepala Daerah untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja denganmemberikan reward and punishment yang jelas

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA_Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah merupakan langkah strategis dalam perencanaan pembangunan yang akan mendasari penyusunan kinerja SKPD selama lima tahun. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkanpermasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan visi yangingin dicapai oleh SKPD. Pernyataan tujuan ini selanjutnya akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai olehSKPD. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah bahwa tujuan harus realistis dan dapat dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Dalam merumuskan sasaran yang perlu diperhatikan adalah:

1. Sasaran harus dapat menyatakan sebuah target yang terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik, dan sesuai dengan bidang layanan SKPD;
2. Indikator kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;
3. Kelompok sasaran yang dilayani;
4. Profil pelayanan terkait indikator kinerja;
5. Isu-isu strategis SKPD yang sesuai dengan bidang layanan SKPD;
6. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan;
7. Pencapaian satu tujuan dapat saja melalui beberapa sasaran; dan
8. Kriteria SMART-C yaitu:

a) *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasidengan jelas;

b) *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan denganjelasdan terukur;

c) *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkaitdengan kapasitas dan sumber daya yang ada;

d) *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara targetsasarandengan tujuan;

e) *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaranditetapkan; dan

f) *Continously improve (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapatdicapai secara bertahap*

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari visi misi Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah dirumuskan dalam tabel berikut ini :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRAPD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARANPADATAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRAPD
					2021 (target)	2021 (realisasi)	2022	2024	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar		Presentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	94,33%	94,23%	97,63%	95,50%	96,66%	97,83%	99,00%	99,00 %
		Meningkatkan Penanganan PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Presentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	94,33%	94,23%	97,63%	95,50%	96,66%	97,83%	99,00%	99,00 %
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Predikat akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai	74,76	83,48	83,50	83,50	83,75	83,85	84,00	84,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih

   Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diberikan kewenangan melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang sosial. Pelaksanaan kewenangan tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal, Misi Kepala Daerahyang dibebankan Kepada Dinas Sosial diantaranya :

   a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitaspelayanan publik.
   b) Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.

2. Pencapaian SDGs

   Dalam hal pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan Dinas SOial memberikan kontribusi dalam penanganan dan upaya penegentasan kemiskinan. Terlihat dari beberapa program dan kegiatan yang disasarkan kepada kelompok marginal. Dalam hal penanganan kemiskinan, masyarakat Kutai Kartanegara yangmasuk didalam Basis Data Terpadu Kemiskinan memperoleh bantuan Sosial juga dari Kementrian Sosial RI melalui Program PKH dan BPNT dimana Kabupaten memiliki kewajiban mendukung kegiatan pendampinganterhadap pelaksanaan program tersebut.

3. Pengentasan Kemiskinan.

   Upaya pengentasan kemiskinan sesungguhnya tidak mungkin dibebankan kepada Dinas Sosial saja Karena dari sisi kriteria kemiskinan sendiri terdapat beberapa bagian merupakan tanggung jawab instansi terkait lainya. Dinas Sosial berfungsi lebihkepada upaya pemenuhan Jaminan Hidup dan fasilitasi terhadap aksesibilitas warga miskin

dalam memperoleh pelayanan yang layak. Oleh karena itu kolaborasi antar seluruh stake holder terkait sangat diperlukan dalam memecahkan masalah pengentasan kemiskinan. Dan harapanya Dinas Sosial ada digarda terdepan dalam upaya upaya tersebut, bukan berate sebagai penanggungjawab utama tetapi lebih kepada perumusan strategi penanganan kemiskinan yang tepat dan sesuai dengan karakter kemiskinan wilayah.

4. Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
5. Pencapaian SPM

   Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang menjadai tanggung jawab instansi Sosial di daerah menurut Permensos RI No. 9 Tahun 2018 tentang SPM bidang Sosial Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota diantaranya :

   a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luarPanti Sosial
   b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial
   c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial.
   d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial.
   e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Dalam hal ketersediaan anggaran Perangkat daerah telah berupaya melakukan pemenuhan terhadap SPM tersebut.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lainmeliputi :

   1. Pada tahun anggaran 2025 Jumlah Program yang dilaksanakan Dinas Sosial sebanyak 7 Program dengan 19 kegiatan.
   2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial menyesuaikan jenis, target dan sasaran program maupunkegiatan, Lokasi kegiatan bisa bersifat menyeluruh di diwilayah Kabupaten Kutai

Kartanegra untuk Kegiatan yang bersifat pendampingan da nada juga yang terfokus ke satuKecamatan atauDesa jika jenis kegiatanya bersifat Pelatihan Ketrampilan.

3. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif di tahun 2025 adalah sebesarRp. 44.077.027.484,-

c. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial tahun 2025 danPerkiraan maju Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara :

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				**40.454.496.674**	APBD (Dana Bagi Hasil)			**42.678.827.484**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		82 Nilai	**17.317.196.674**	APBD (Dana Bagi Hasil)		84 Nilai	**19.849.827.484**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tercapainya Nilai SAKIP**		**82 Nilai**	**1.000.000.000**	**APBD (Dana Bagi Hasil)**		**84 Nilai**	**900.000.000**
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Dokumen	50.000.000
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Data	250.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Data	250.000.000
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Berita Acara	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Berita Acara	50.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	3 Dokumen	450.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	6 Dokumen	300.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	6 Laporan	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	12 Laporan	50.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	8 Laporan	150.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	8 Laporan	200.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**		**22 Laporan**	**11.708.906.176**	**APBD (Dana Bagi Hasil)**		**22 Laporan**	**12.082.027.460**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1106 Orang/Bulan	11.293.906.176	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	1106 Orang/Bulan	11.482.027.460
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Laporan	250.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Laporan	250.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	140.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	12 Laporan	325.000.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	25.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Dokumen	25.000.000

RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Sumber Dana**		**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD**		**4 Laporan**	**205.000.000**	APBD (Dana Bagi Hasil)		**4 Laporan**	**189.460.000**
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	25.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Dokumen	25.000.000
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Laporan	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Laporan	50.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	4 Laporan	30.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	4 Laporan	89.460.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Seluruh Kecamatan	1 Laporan	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	1 Laporan	100.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial**		**2 Dokumen**	**40.000.000**			**2 Dokumen**	**520.000.000**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	170 Paket	0	APBD (Dana Bagi Hasil)		170 Paket	280.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Dokumen	40.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	2 Dokumen	40.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	15 Orang	0	APBD (Dana Bagi Hasil)		15 Orang	200.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial**		**8 Layanan**	**394.341.800**			**8 Layanan**	**1.507.000.000**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	5 Paket	5.110.200	APBD (Dana Bagi Hasil)		5 Paket	60.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	20 Paket	59.247.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		20 Paket	97.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	5 Jenis	30.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		10 Paket	250.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Paket	19.986.600	APBD (Dana Bagi Hasil)		4 Paket	100.000.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Paket	29.998.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		2 Paket	150.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Laporan	200.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	300 Laporan	300.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	50 Dokumen	30.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		300 Dokumen	250.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	20.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Dokumen	300.000.000

RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Sumber Dana**		**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**		**100 Persen**	**42.950.000**			**100 Persen**	**700.000.000**
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	5 Paket	0	APBD (Dana Bagi Hasil)		5 Paket	200.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	10 Unit	42.950.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		20 Unit	500.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**12 Bulan**	**767.586.698**			**12 Bulan**	**1.406.340.024**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Laporan	2.299.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		3 Laporan	8.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	193.239.174	APBD (Dana Bagi Hasil)	P1 = Wajib dan Mengikat	12 Laporan	316.485.288
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	572.048.524	APBD (Dana Bagi Hasil)		12 Laporan	1.081.854.736
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah / Asset pada Dinas Sosial**		**100 Persen**	**3.158.412.000**			**100 Persen**	**2.545.000.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	33 Unit	90.180.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		33 Unit	470.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	5 Unit	34.010.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		29 Unit	300.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Unit	34.222.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		75 Unit	75.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Unit	3.000.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		2 Unit	1.500.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	41 Unit	0	APBD (Dana Bagi Hasil)		41 Unit	200.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial**		**92 Persen**	**6.170.000.000**			**94 Persen**	**8.014.000.000**
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya pengetahuan lembaga atau perorangan dalam tata cara penyelenggaraan undian dan pengumpulan sumbangan**		**50 Orang**	**75.000.000**			**50 Orang**	**75.000.000**
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	75.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		1 Dokumen	75.000.000
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase PSKS yang dikembangkan**		**100 Persen**	**6.095.000.000**			**100 Persen**	**7.939.000.000**
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	400.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	KP_Stunting	20 Orang	400.000.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	400.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		20 Orang	750.000.000

RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Sumber Dana**		**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	240 Lembaga	5.245.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		240 Lembaga	6.739.000.000
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	5 Sertifikat	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		5 Sertifikat	50.000.000
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	**Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh fasilitas pemulangan**		**100 Persen**	**50.000.000**			**100 Persen**	**50.000.000**
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	**Persentase Korban Tindak Kekerasan yang terlayani**		**100 Persen**	**50.000.000**			**100 Persen**	**50.000.000**
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	50 Orang	50.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)		50 Orang	50.000.000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)**		**100 Persen**	**5.508.500.000**			**100 Persen**	**4.965.000.000**
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS di luar panti**		**1250 Orang**	**4.818.500.000**			**1250 Orang**	**4.275.000.000**
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	820 Orang	3.508.500.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN KP_Stunting; Penanggulangan Kemiskinan	700 Orang	3.000.000.000
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	150.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	200 Orang	150.000.000
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	525.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	50 Orang	400.000.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	150.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	50 Orang	150.000.000

RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Sumber Dana**		**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	310.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN ; Infra Pendidikan	100 Orang	400.000.000
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	75.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	50 Orang	75.000.000
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	100 Orang	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	100 Orang	100.000.000
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti**		**695 Orang**	**690.000.000**			**695 Orang**	**690.000.000**
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Orang	75.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	75 Orang	75.000.000
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	200.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	200 Orang	200.000.000
Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	80.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	200 Orang	80.000.000
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	60.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	20 Orang	60.000.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	100 Orang	100.000.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	100.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	100 Orang	100.000.000
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Dokumen	75.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	2 Dokumen	75.000.000

RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Sumber Dana**		**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial** **Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial**		**100 Persen** **97,83 Persen**	**7.033.800.000**			**100 Persen** **99,00 Persen**	**6.500.000.000**
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	**Terpeliharanya anak-anak terlantar**		**25 Orang**	**1.000.000.000**			**40 Orang**	**1.000.000.000**
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	1.000.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN ; PD3 = Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat ; PN8 = Reformasi Perlindungan Sosial	40 Orang	1.000.000.000
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial**		**100 Persen**	**6.033.800.000**			**100 Persen**	**5.500.000.000**
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175209 Orang	380.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	PD3 = Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat ; PN8 = Reformasi Perlindungan Sosial	175209 Orang	380.000.000
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65403 Keluarga	500.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	PD3 = Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat ; PN8 = Reformasi Perlindungan Sosial	65403 Keluarga	370.000.000
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Keluarga	4.903.800.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN ; KP_Stunting	1500 Keluarga	4.500.000.000
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Orang	250.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ; P3 = Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN ;	75 Orang	250.000.000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten**		**100 Persen**	**2.475.000.000**			**100 Persen**	**2.550.000.000**
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terlayani**		**100 Persen**	**1.250.000.000**			**100 Persen**	**1.400.000.000**

RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
Program / Kegiatan/ / Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Sumber Dana**		**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Orang	600.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;	1500 Orang	600.000.000
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Orang	300.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal ;	1500 Orang	500.000.000
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penerima Bantuan Penyediaan Tempat Penampungan dalam masa tanggap darurat bencana	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	200.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal Infra_KMK	100 Orang	200.000.000
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Penerima Bantuan Dukungan Psikososial pasca masa tanggap darurat bencana	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	150.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	P2 = Standar Pelayanan Minimal	50 Orang	100.000.000
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kampung Siaga Bencana		12 Desa	**1.225.000.000**			12 Desa	**1.150.000.000**
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Badak, Samboja	12 Desa	750.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	Infra_KMK	12 Desa	750.000.000
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	25 Orang	475.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	Infra_KMK	25 Orang	400.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dikelola		100 Persen	**1.900.000.000**			100 Persen	**750.000.000**
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara		100 Persen	**1.900.000.000**			100 Persen	**750.000.000**
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tenggarong, Sanga-Sanga	2 Dokumen	1.500.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	Infra_KMK	2 Dokumen	500.000.000
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Tenggarong, Sanga-Sanga	2 Makam	400.000.000	APBD (Dana Bagi Hasil)	Infra_KMK	2 Makam	250.000.000
TOTAL				**40.454.496.674**				**42.678.827.484**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) PD merupakan dokumen perencanaan Perangklat Daerah tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Tahun 2025, proses penyusunan RKPD Tahun 2025 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah.

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian ;
   1. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial.
   2. Optimalisasi Kegiatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
   3. Keterbatasan sarana prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
   4. Kecenderungan peningkatan jenis dan jumlah penyandang masalahkesejahteraan sosial.
   5. Kurangnya sinergi stakeholders dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

b. Kaidah – kaidah pelaksanaan ;

   Berdasarkan panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk kurun waktu satu tahun. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja PD Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara kurun waktu 2025 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menangah, Renstra perludievaluasi berkala untuk menjamin bahwa target kinerja yang telah disusun masih relevan dengan kebutuhan perkembangan permasalahan sosial.

c. Rencana tindak lanjut ;
   1. Peningkatan Kualitas Sumber daya aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial.
   2. Optimalisasi Pemutakhiran DTKS.
   3. Pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
   4. Sinergitas antar stakeholders.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah berisi perencanaan strategis yang

bersifat operasional dalam menterjemahkan tugas dan fungsi perangkat daerah.Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi unitkerja di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusunrencanakerja tahunan yang ditandai dengan dituangkannya lokasi, sasaran dan indikator kinerja out put dan out come dari setiap kegiatan. Perencanaan strategis ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien danakuntabel, sehingga peningkatan kinerja individu, unit kerja dan organisasi dapat tercapai. Akhirnya semoga Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini dapat dijadikan pedoman dan acuan dalampenyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Akhirnya semoga Dokumen Renja Perangkat Daerah tahun 2025 ini dapat memberikan arahan yang jelas tentang apa yang akan dilaksanakan oleh DinasSosial. Dukungan dalam hal penganggaran sangat diharapkan sehingga capaian target yang telah ditentukan dapat terwujud.

k.RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Dengan ditetapkannya UU. No. 17 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah otonomi diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematik, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan perencanaan pembangunan dalam periode 25 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 tahunan, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sebagai Rencana tahunan dimana ketiga dokumen tersebut dilaksanakan oleh masing-masing OPD di Kabupaten Kutai Kartanegara; salah satunya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai

Kartanegara telah menyusun dokumen Rencana Strategis (RENTRA)-nya. Dokumen Tersebut Memuat Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum yang diikuti dengan menyusun sasaran dan kebijakannya. Dari kebijakan tersebut maka disusun program, kegiatan, indikator kinerja dan indikator kinerja utama yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2021-2026. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, Renstra tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum. Renja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Berikutnya.

Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum telah menyusun Rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum yang telah diselaraskan dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025. Dokumen tersebut selanjutnya diperbaiki berdasarkan masukan dari hasil forum OPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dan menjadi Rancangan Akhir Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025.

Untuk memastikan keselarasannya dengan dokumen perencanaan lainnya, maka pembahasan terhadap dokumen tersebut oleh tim verifikasi Kabupeten Kutai Kartanegara. Pembahasannya mencakup :

1. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan
2. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Penyelarasan program dan kegiatan antar OPD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025 merupakan penjabaran program / kegiatan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026, mengacu pada program/kegiatan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 serta berpedoman pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim 2025. Dengan demikian program/kegiatannya diarahkan untuk mewujudkan target indikator capaian RKPD, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam renja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS).

1.2 Landasan Hukum.

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Secara rinci maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menjadi panduan bagi organisasi Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya sesuai dengan pelimpahan urusan kepada dinas.
2. Menjadi pedoman untuk mengukur kinerja aparatur berdasarkan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi dinas.

Tujuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

1. Acuan Dinas Pekerjaan Umum dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2025.
3. Mengoptimalkan upaya dan kinerja pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum yang memadai di Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Menciptakan kemudahan dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kepada seluruh elemen internal maupun eksternal institusi, dalam rangka meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan.
5. Mensinergikan dan mensikronisasikan program-program nasional, provinsi dan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan.

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan.

Pada bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum latar belakang penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, landasan hukum penyusunan dokumen, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan,

sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II : Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2025 mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan RENJA OPD/SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD/SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan RENJA OPD/SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD/SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai

dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dimaksudkan untuk menindaklanjuti permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara agar pelaksanaan kegiatan yang tidak

dapat dilaksanakan pada tahun anggaran yang lalu tidak terulang kembali pada tahun anggaran yang berjalan saat ini.

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait

langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang berhubungan langsung dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD/SKPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah agar dapat dicapai.

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Per9angkat Daerah

4.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis

program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

Bab V : Penutup

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum pada Tahun 2023, disimpulkan bahwa belum semuanya dapat dilaksanakan secara optimal, disebabkan adanya perubahan kondisi yang terjadi dilapangan dari kondisi yang direncanakan semula serta kendala-kendala teknis lainnya yang belum mampu dituntaskan selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan.

Beberapa kegiatan yang sudah dicapai tersebut, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat, hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran, ada yang sampai tingkat output dan adapula yang sampai pada tingkat outcome. Penyebabnya adalah belum dapat secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat, hal ini disebabkan karena penyusunan basis data yang masih kurang. Dalam tahun mendatang tentunya akan merumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari 7 Program dan 18 Kegiatan.

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2022) persentase realisasi angggaran sebesar 83,04%, rincian realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel 4. Dengan demikian, pada tahun 2023 terjadi penurunan persentase realisasi anggaran sebesar 7,14% hal ini disebabkan karena kurang optimalnya serapan anggaran dikarenakan adanya penumpukan penagihan pada akhir tahun sehingga berpotensi menjadi utang, hal ini dapat dilihat pada tabel T-C. 29

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,50	72,50	70,25	81,40	1,16	75,00	75	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	100		100	100	100	0	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5	3	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	0	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	100	0	100	100	100	0	0	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100	100	100	100	100	0	0	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	0	0	0	352	352	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	persentase Pelaksanaan penata usahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100	100	100	100	100	0	0	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0	0	0	2500	4	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang dinilai	100	100	100	100	100	0	29	
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0	0	0	5	29	
1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	persentase rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	100	100	100	100	100	0	29	
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0	0	0	1	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0	0	0	8	1	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	0	0	
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	400	100	400	400	100	350	272	
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase bimbingan teknis implementasi peratuiran perundang undangan	100	100	100	100	100	0	0	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	65	19	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat	100	100	100	100	100	100	0	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	100	100	100	100	100	0	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	0	7	1	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	100	100	100	100	0	0	
		Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	0	0	0	0	0	2	1	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	100	100	100	100	100	0	0	
		Jumlah Laporan penyelenggara rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	0	0	0	0	0	100	25	
1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase penata usahaan arsip dinamis pada SKPD	100	100	100	100	100	0	0	
		Jumlah Dokumen penata usahaan arsip dinamis pada SKPD	0	0	0	0	0	2	10000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	0	0	
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0	5	1	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	100	100	100	100	0	0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	0	0	0	3	35	
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100	100	100	100	100	0	0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	0	10	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100	100	100	100	100	0	0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	0	3	35	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah (unit)	40	0	22	22	100	0	0	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	100	100	100	100	100	0	0	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	0	0	0	0	4	25	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	100	100	100	100	100	0	25,9	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	0	1	0	
1.03.02.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER ADAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,85	0.85	0,85	0,85	0,85		0,64	
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	0,08	0.08	0,08	0,08	0,08		0	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04		0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten								
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Permukiman yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendali Banjir dan Abrasi	90,75	0	0	0	0		0	
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Penampung Air Lainnya	8	0	8	8	100	5	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	2	0	2	2	100	5	0	
1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang direhabilitasi	1	1	1	1	100	0	0	
1.03.02.2.01.31	Rehabilitasi Check Dam	Jumlah check dam yang direhabilitasi	1	0	1	1	100	0	0	
1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	20000	0	20000	20000	100	50,02	0	
1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	16	0	16	16	100	2	0	
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	20000	4000	20000	20000	100	24,5	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang bangunan pengaman pantai	6000	1	6000	6000	100	0,6	0	
1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	5	0	1	0	0	5	0	
1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0	1	2	2	100	1,5	0	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Irigasi Primer dan Sekunder Dalam Kondisi Baik	85	78	0	0	0	0	64,09	
1.03.02.2.02.35	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	5	0	1	1	100	160	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.02.2.02.03	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	3	0	0	0	0	0	0	
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	14600	1950	2400	2400	100	446,793	0	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	40000	0	17827	17827	100	74,91	0	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	60000	0	15000	15000	100	50,02	0	
1.03.02.2.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	16	0	4	4	100	0	0	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE									
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai		0	0	100	100	100		0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	dalam Daerah Kabupaten/Kota									
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase yang dibangun	0	0	150	150	100	0,377	0	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase yang dipelihara	0	0	2500	2500	100	12220	0	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung	62,23	56,00	62,23	62,23	100		65,71	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	350	100	100	100	100		100	
		Jumlah bangunan gedung yang dapat digunakan	276	0	0	0	0		0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah dokumen IMB, SLF, TABG, Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	16	100	100	100	100	1	100	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan yang dapat digunakan	16	16	16	16	100	7	14	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	85	65.50	85	85	100	100	70,00	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten	20	56	56	56	100	0	34	
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungan yang ditata	4	33	33	33	100	32	34	
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungan yang dipelihara	16	23	23	23	100	5	0	
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0	8	8	8	100	0	1	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan	65,13		65,13	65,49	100,55			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten	1428,38		1428,38	1436,37	100,56			
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	19	1	38	38	100	2	0	
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk penyelenggaraan Jalan	Luasan lahan yang dibebaskan	0,8	111,34	0	0	0	0	0	
1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	4	1	1	1	100	1	0	
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	86,26	62,88	184	184	100	119	8,95	
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	848,8	6,6705	4000	4000	100	12,03	1	
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	12	2	2	2	100	2	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	730,74	6,0415	5797	5797	100	24,46	5,36	
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	563,54	0,5	400	400	100	3,67	0	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	0	11	1	1	100	2	0	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	2197,32	7,751	3430	3430	100	7,74	5	
1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang memiliki lebar dibawah standar	0	1718	5,227	5,227	100	2,17	2	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	2	1	5	5	100	346,7	1	
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan dalam kondisi rusak berat	3	0	9	9	100	0	0	
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	jumlah jembatan dalam kondisi baik dan sedang	0	0	1	1	100	0	2	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.10.2.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah jembatan dalam kondisi rusak ringan	0	0	5	5	100	0	5	
1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase panjang jalan dan jumlah jembatan yang dipantau dan dievaluasi	0	0	100	100	100	1	100	
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase panjang jalan dan jumlah jembatan yang diawasi	0	0	100	100	100	1	100	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan Pengembangan Jasa Kontruksi (SOP, Data, Layanan, Intruktur dan Tenaga Terampil/Ahli)	100	90	100	90	90		50	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Yang Akan Mengikuti Pelatihan	100	124	150	124	82,67	200	58	
1.03.11.2.01.0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi	Jumlah SDM trainer yang sudah lulus seleksi	100	124	150	124	82,67	1	5	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis									
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Yang Telah Dibuat	0	1	1	1	100	0	0	
1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	0	
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah badan usaha jasa konstruksi yang tertib Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	0	17	20	17	85	1	150	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.11.2.02.0003	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen pengawasan dan evaluasi	0	1	20	17	85	1	0	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adanya perbedaan indikator Sub Kegiatan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021-2026 menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.12.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk mengetahui capaian kinerja pelayanan OPD/SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat dilihat pada tabel T-C. 30 sebagai berikut:

TC 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			70,25	70,5	71,25	72,50	81,4				
	Persentase laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd			100	100	100	100	100	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0	0	0	0	0	3	5	5	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD			100	100	100	100	100	0	1	1	
	Persentase Penyediaan gaji dan tunjangan ASN			100	100	100	100	100	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			0	0	0	0	0	352	336	336	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

	persentase Pelaksanaan penata usahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD			100	100	100	100	100	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0	0	0	0	0	4	12	12	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang dinilai			100	100	100	100	100	29	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0	0	0	0	0	0	1	1	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			0	0	0	0	0	29	1	1	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	persentase rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD			100	100	100	100	100	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0	0	0	0	0	1	2	2	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadaka			400	400	400	400	400	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			0	0	0	0	0	272	50	50	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

	Persentase bimbingan teknis implementasi peratuiran perundang undangan			100	100	100	100	100	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			0	0	0	0	0	19	30	30	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Persentase Administrasi umum Perangkat			100	100	100	100	100	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0	0	0	0	0	0	1	1	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			0	0	0	0	0	0	1	1	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Persentase penyediaan bahan logistik kantor			100	100	100	100	100	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0	0	0	0	0	1	1	1	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan			100	100	100	100	100	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			0	0	0	0	0	1	1	1	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Persentase penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD			100	100	100	100	100	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0	0	0	0	0	25	25	25	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

	Persentase penata usahaan arsip dinamis pada SKPD			100	100	100	100	100	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			0	0	0	0	0	10000	1000	1000	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	0	0	0	0	1	1	1	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			0	0	0	0	0	0	15	15	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			0	0	0	0	0	0	25	25	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0	0	0	0	0	3	3	3	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	100	100	100	100	32			Renstra DPU 2021-2026
	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			100	100	100	100	100	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			0	0	0	0	0	35	36	36	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Persentase penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			100	100	100	100	100	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0	0	0	0	0	0	5	5	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor			100	100	100	100	100	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			0	0	0	0	0	35	12	12	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Jumlah Barang Milik Daerah (unit)			22	22	22	40	22		22	22	Renstra DPU 2021-2026
	Persentase penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan			100	100	100	100	100	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			0	0	0	0	0	25	87	22	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			0	0	0	0	0	0	18	18	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0	0	0	0	0	0	2	3	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Persentase pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya			100	100	100	100	100	25,9	3	3	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0	0	0	0	0	0	3	3	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi		78,00	0,78	0,80	0,82	0,85	0,85	0,64	0,74	0,79	
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten		6,10	0,03	0,05	0,06	0,08	0,08	0	0	0	Tidak Ada Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten		1,46	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04	0	0	0	Tidak Ada Pantai dalam Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten
	Luas Wilayah Permukiman yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendali Banjir dan Abrasi			0	0	0	90,75	0	0	0	0	
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Penampung Air Lainnya			0	0	0	8	8	0	0	0	
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai			0	0	0	2	2	0	0	0	
	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang direhabilitasi			0	0	0	0	1	0	0	0	

	Jumlah check dam yang direhabilitasi			1	0	0	1	1	0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara			50000	50000	50000	50000	20000	0	7200	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara			0	0	0	0	16	0	2	4	
	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi			0	0	0	0	20000	0	5000	2000	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Panjang bangunan pengaman pantai			1500	1500	1500	1500	6000	0	0	1500	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun			1	1	1	1	0	0	0	1	Renstra DPU 2021-2026
	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun			0	0	0	0	2	0	1	0	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Persentase Irigasi Primer dan Sekunder Dalam Kondisi Baik			78	80	82	85	64,09	64,09	74	79	
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun			8	0	0	0	1	0	1	1	
	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun			0	1	1	1	0	0	0	0	
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan			2500	3200	3200	3200	2400	0	6000	1600	Renstra DPU 2021-2026
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi			10000	10000	10000	10000	17827	0	0	1875	Renstra DPU 2021-2026

	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara			15000	15000	15000	15000	15000	0	8238	5000	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara			0	0	0	0	4	0	0	0	
	Panjang saluran drainase yang dibangun			0	0	0	0	150	0	0	0	
	Panjang saluran drainase yang dipelihara			0	0	0	0	2500	0	3000	0	
	Persentase Penataan Bangunan Gedung		100	61,86	61,39	61,64	61,88	62,23	65,71	65,96	66,21	
	Jumlah pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			50	50	50	50	100	100	100	100	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah bangunan gedung yang dapat digunakan			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah dokumen IMB, SLF, TABG, Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG			4	4	4	4	100	100	100	100	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah bangunan yang dapat digunakan			4	2	2	3	16	14	2	2	Renstra DPU 2021-2026
	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya		100	65,75	66,22	66,67	67,11	65,50	70,00	70,25	70,50	
	Jumlah Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten			2	2	2	2	56	34	2	2	
	Jumlah bangunan dan lingkungan yang ditata			1	1	1	1	33	34	2	2	Pekerjaan Lanjutan belum bisa menyelesaikan 1 kawasan
	Jumlah bangunan dan lingkungan yang dipelihara			1	1	1	1	23	0	0	0	

	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota			0	0	0	0	8	1	1	1	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan		73,5	64,22	64,66	64,95	65,13	65,49	65,49	65,97	69,25	Proyeksi pada Tahun 2025 dan 2026 akan dapat dicapai apabila capaian Tahun 2023 sebesar 78,895 Km yang seluruhnya merupakan Ruas Jalan sesuai SK, dan capaian Tahun 2025 dan 2026 berturut-turut 73 Km dan 72 Km (Ruas Jalan sesuai SK).
	Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten			1407,92	1418,03	1424,39	1428,38	1436,37	1436,37	1449,28	1521,28	Data ini dengan berdasarkan data Kondisi Mantap Per Tahun 2023 sebesar 59,0089 %
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun			4	3	3	3	38	0	2	2	
	Luasan lahan yang dibebaskan			0	0,6	0	0		0	0	0	Renstra DPU 2021-2026
	Jumlah Jembatan yang Diganti			0	1	1	1	1	0	1	2	Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

	Panjang Jalan yang Direkonstruksi			1	0,6	1,4	2	184	8,95	50	50	Jumlah Anggaran yang diperlukan dengan pendekatan Rekonstruksi Jalan sebesar Rp. 10.000.000.000,00/Km adalah Rp. 500.000.000.000,00 Tahun 2025 dan Rp. 500.000.000.000,00 Tahun 2026
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala			4	3	3	3	4000	1	4	3	Jumlah Anggaran yang diperlukan dengan pendekatan Pemeliharaan Berkala Jalan sebesar Rp. 4.000.000.000,00/Km dengan lingkup pekerjaan berupa overlay struktural aspal adalah Rp. 16.000.000.000,00 Tahun 2025 dan Rp. 12.000.000.000,00 Tahun 2026
	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya			2	2	2	2	2	0	2196,94	2196,94	

	Panjang Jalan yang Direhabilitasi			0,9	1	1	1	5797	5,36	10	10	Jumlah Anggaran yang diperlukan dengan pendekatan Rehabilitasi Jalan sebesar Rp. 7.500.000.000,00/Km adalah Rp. 75.000.000.000,00 Tahun 2025 dan Rp. 75.000.000.000,00 Tahun 2026
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin			2	2	2	2	400	0	2	2	Jumlah Anggaran yang diperlukan dengan pendekatan Rehabilitasi Jalan sebesar Rp. 2.000.000.000,00/Km adalah Rp. 4.000.000.000,00 Tahun 2025 dan Rp. 4.000.000.000,00 Tahun 2026
	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian			1			0	1	0	0	0	
	Panjang jalan yang dibangun			0,4	0,2	0	0	3430	0	5	5	
	Panjang jalan yang memiliki lebar dibawah standar			0	0	0	0	5,227	0	2	2	
	Jumlah jembatan yang dibangun			1	1	0	0	5	0	1	2	

	Jumlah jembatan dalam kondisi rusak berat			0	0	0	0	9	236	0	0	Indikator ini telah diuraikan pada indikator penggantian Jembatan sehingga proyeksi di isi 0 (Nol) Jembatan
	jumlah jembatan dalam kondisi baik dan sedang			0	0	0	0	1	113	2	2	Jumlah Anggaran yang diperlukan dengan pendekatan Rehabilitasi Jalan sebesar Rp. 75.000.000.000,00/Km apabila pelebaran dilakukan bersamaan dengan perbaikan darainase jalan yang menjadi pelebaran perkerasan adalah Rp. 150.000.000.000,00 Tahun 2025 dan Rp. 150.000.000.000,00 Tahun 2026
	Jumlah jembatan dalam kondisi rusak ringan			0	0	0	0	5	52	5	5	
	Persentase panjang jalan dan jumlah jembatan yang dipantau dan dievaluasi			0	0	0	0	100	0	100	100	
	Persentase panjang jalan dan jumlah jembatan yang diawasi			0	0	0	0	100	60	100	100	
	Cakupan Pengembangan Jasa Kontruksi (SOP, Data, Layanan, Intruktur dan Tenaga Terampil/Ahli)		100	100	100	100	100	90	50	100	100	

	Jumlah Tenaga Terampil Yang Akan Mengikuti Pelatihan			20	20	20	20	124	58	200	100	
	Jumlah SDM trainer yang sudah lulus seleksi			20	20	20	20	124	5	10	10	
	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Yang Telah Dibuat			3	3	3	3	1	0	1	1	
	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan			1	1	1	1	1	0	1	0	
	Jumlah badan usaha jasa konstruksi yang tertib Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			1	1	1	1	17	150	300	400	
	Jumlah dokumen pengawasan dan evaluasi			0	0	0	0	17	0	50	60	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Tugas pokok dan fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara dan Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Dinas Pekerjaan Umum. Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati, sedangkan fungsinya :

1. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang Pekerjaan Umum;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
3. Pembinaan dan pelaksanan teknis di bidang Pekerjaan umum;
4. Pembinaan Unit Pelaksanan Teknis Dinas;
5. Pelaksanaan urusan Kesekretariatan Dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati di bidang Pekerjaan umum. Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas Pekerjaan Umum diuraikan ke dalam masing- masing sub unit kerja.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum relatif kurang terutama tenaga teknis yang berlatar belakang pendidikan yang sesuai kebutuhan pada bidang Bina Marga, bidang Sumber Daya Air, dan bidang Cipta Karya meskipun pada saat ini sudah ada beberapa tenaga teknis yang dibutuhkan dan sebagian lagi harus lebih disesuaikan dan lebih ditingkatkan lagi. Mengingat kewajiban dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum sangat besar, sudah sewajarnyalah bila SDM pada dinas ini lebih diperkuat dan ditingkatkan.

c. Prasarana dan Sarana

Nilai SDM yang relatif baik tersebut tidak akan mencapai kinerja yang maksimal jika tidak ditunjang oleh prasarana dan sarana yang memadai, misalnya fasilitas IT yang cukup memadai, sarana bagi tenaga pengawas/koordinator lapangan, perencanaan banyak yang tidak lagi berupa *blue print* ataupun hardcopy, pengarsipan yang belum tertata dengan baik. Oleh karenanya sebagai organisasi penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu lebih ditingkatkan sehingga kinerja aparatur Dinas Pekerjaan Umum dapat meningkat sesuai dengan harapan yang diinginkan.

d. Sumber Dana

Disamping dari APBD Kab. Kutai Kartanegara, APBN (DAK), Bantuan Provinsi (BANKEU), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil-Sawit (DBH-Sawit) dari ketiga anggaran tersebut diharapkan anggarannya tersedia karena anggaran tersebut sangat memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan. Tanpa ada dana suatu kegiatan dapat dipastikan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu rencana kinerja tahunan harus menyesuaikan dengan kemampuan APBDnya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja harusnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan

yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dan untuk itu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tetap berjalan sesuai dengan jalur yang ada sesuai petunjuk teknis dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimum yang disyaratkan sehingga capaian tujuan akhir dari setiap pelaksanaan program dapat terwujud secara sistematik, terarah dan tepat waktu.

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, kemudian penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD dan atau program kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Tabel T-C.31.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,25	39.432.268.695,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,25	56.622.571.390,00	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	100.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	1.100.000.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	450.000.000,00	Dokumen Renstra 2025-2030, Renja 2026, Renja Perubahan 2025
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	100.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	100.000.000,00	Penyusunan Dokumen LKjIP, LPPD, Perjanjian Kinerja, Laporan SPIP dan Manajemen Risiko
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	150.000.000,00	
1.03.01.2.01.008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung					Penyelenggaraan Walidata Pendukung	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata	1 Dokumen	50.000.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Statistik Sektoral Daerah					Statistik Sektoral Daerah		Pendukung Statistik Sektoral Daerah			
1.03.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	250.000.000,00	Satu Data (BECIK)
1.03.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	100.000.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	1 dokumen	34.235.565.759,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan / semesteran SKPD	1 dokumen	42.432.571.390,00	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	persentase Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100 Persen	33.885.565.759,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Org/ 12 bulan	41.382.571.390,00	
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	persentase Pelaksanaan penata usahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100 persen	350.000.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	650.000.000,00	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan / Semesteran SKPD	1 Laporan	350.000.000,00	
1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanega ra	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	25.000.000,00	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang dinilai	50 Laporan	225.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang dinilai		175.000.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah/Aset Dinas Pekerjaan Umum
1.03.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah/Aset Dinas Pekerjaan Umum
1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	persentase rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	100 persen	225.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD semester 1	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100.000.000,00	Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah/Aset Dinas

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
											Pekerjaan Umum
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 dokumen	200.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 dokumen	800.000.000,00	
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	350 Unit	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	50.000.000,00	
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	persentase bimbingan teknis implementasi peratuiran perundang undangan	100 persen	200.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200 orang	750.000.000,00	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi	100%	965.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat	100%	1.715.000.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
			umum Perangkat								
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	750.000.000,00	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	persentase penyediaan bahan logistik kantor	100 persen	275.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	275.000.000,00	Belanja Natura dan Pakan-Natura, Biaya Konsumsi Rapat, Acara Hari Besar dan Aktivitas Lapangan
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100 persen	100.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	Barang Cetakan : Fotokopi, Map Dinas,
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	persentase penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	100 persen	500.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	500.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	persentase penata usahaan arsip dinamis pada SKPD	100 persen	90.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 dokumen	90.000.000,00	Jasa Penataan Arsip Inaktif Kompleks dan Multimedia
1.03.01.2.07	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah				-	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah				500.000.000,00	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara									
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	500.000.000,00	
1.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	-	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100 persen	3.091.702.936,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100 persen	8.250.000.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
			Pemerintahan Daerah					Pemerintahan Daerah			
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 persen	100.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	2.700.000.000,00	Internet, Listrik dan SDA
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	persentase penyediaan jasa peraltan dan perlengkapan kantor	100 persen	566.879.448,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	500.000.000,00	Pemeliharaan AC, CCTV, Peralatan dan Mesin Kantor dan Rumah Tangga
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 persen	2.424.823.488,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	5.050.000.000,00	Jasa Tenaga Administrasi, Keamanan, Kebersihan, BPJS & Media Onlo=ine
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Jumlah Barang Milik Daerah	50	615.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Jumlah Barang Milik Daerah	50	1.650.000.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Pemerintahan Daerah					Pemerintahan Daerah					
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	persentase penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	100 persen	450.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 Unit	450.000.000,00	Belanja BBM, Pemeliharaan Kendaraandan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	27	850.000.000,00	BBM dan Pelumas, Perijinan, dan Pemeliharaan Alat Berat
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	200.000.000,00	Pemeliharaan Alat Uji Tekan Beton dan Kalibrasi Peralatan Laboratorium

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	persentase pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	100 persen	165.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 Unit	150.000.000,00	Pemeliharaan Kantor Dinas Pekerjaan Umum, UPT, dan Rumah Dinas Kadis
1.03.02.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER ADAYA AIR (SDA)		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,825	29.650.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER ADAYA AIR (SDA)		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi		93.190.289.363,00	
			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	0,0675				Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten			

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
			Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	0,0325				Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten			
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Luas Wilayah Permukiman yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendali Banjir dan Abrasi		16.850.000.000,00	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Luas Wilayah Permukiman yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendali Banjir dan Abrasi		30.651.663.430,00	
1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai		Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 Km	650.000.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	23.89 KM	3.650.000.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota					Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	3 Lembaga	900.000.000,00	
1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir		Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	200.000.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	200.000.000,00	
1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 Unit	500.000.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	500.000.000,00	
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Sungai yang Dinormalisasi / Direstorasi	4 Km	2.000.000.000,00	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Sungai yang Dinormalisasi / Direstorasi	5 KM	4.000.000.000,00	
1.03.02.2.01.0104	Pembangunan Check Dam	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Check Dam yang Dibangun	1 Unit	1.000.000.000,00						
1.03.02.2.01.0113	Pembangunan Kanal Banjir					Pembangunan Kanal Banjir	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	2 KM	9.000.000.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai					Pembangunan Tanggul Sungai	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1,7 KM	12.401.663.430,00	
1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara		1500 Meter	3.000.000.000,00						
1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	9.500.000.000,00						
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Irigasi Primer dan Sekunder Dalam Kondisi Baik		12.800.000.000,00	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Irigasi Primer dan Sekunder Dalam Kondisi Baik		62.538.625.933,00	
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan					Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,1 Km	1.000.000.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1.03.02.2.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi		Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	1 Bendung	2.500.000.000,00						
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	4 Km	4.000.000.000,00	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	77 KM	56.370.244.914,00	
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	5 Km	3.000.000.000,00						
1.03.02.2.02.2001	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	10 Km	2.500.000.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	11.56 KM	3.868.381.019,00	
1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi		Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 Bendung	300.000.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 Bendung	300.000.000,00	
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi	1 Dokumen	500.000.000,00	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi	1 Dokumen	1.000.000.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
			Irigasi dan Rawa yang Disusun					dan Rawa yang Disusun			
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				-	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				-	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				-	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten / Kota				-	
1.03.06.2.01.0005	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan										
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase Penataan Bangunan Gedung	64.95 Persen	1.450.000.000,00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase Penataan Bangunan Gedung	64.95 Persen	11.220.000.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Jumlah bangunan Gedung yang dapat digunakan		1.450.000.000,00	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Jumlah bangunan Gedung yang dapat digunakan	10	11.220.000.000,00	
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1 Bangunan Gedung	500.000.000,00	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	10 Bangunan Gedung	10.620.000.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	4 Dokumen	950.000.000,00	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	205 Dokumen	600.000.000,00	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	85.00 Persen	11.273.126.361,00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	85.00 Persen	78.079.249.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten	1 Kawasan	11.273.126.361,00	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten	11 Kawasan	78.079.249.000,00	
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	1.880.000.000,00	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	11 Kawasan	77.429.249.000,00	
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di	2 dokumen	9.393.126.361,00	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan	25 Dokumen	650.000.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
			Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota					Strategis Daerah Kabupaten / Kota			
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan	64,95%	43.925.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase Kondisi Kemantapan Jalan	64,95%	578.832.933.396,00	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten		43.925.000.000,00	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten	1.424,39 Km	578.832.933.396,00	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	3 Dokumen	1.450.000.000,00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2 Dokumen	1.900.000.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa					Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	1 KM	150.000.000,00	
1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan		Jumlah Jembatan yang Digant	1 Jembatan	15.000.000.000,00	Penggantian Jembatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Jembatan yang Digant	1 Jembatan	22.000.000.000,00	
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan					Pembangunan Jalan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan yang Dibangun	1 Km	7.000.000.000,00	
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1,4 Km	6.075.000.000,00	Rekonstruksi Jalan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	10,70 Km	76.909.352.396,00	
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	3 Km	7.500.000.000,00	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	3 Km	3.000.000.000,00	
1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa					Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	1 KM	150.000.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar					Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0,36 Km	8.223.581.000,00	
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan					Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1 Jembatan	1.000.000.000,00	
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan					Rehabilitasi Jembatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	1 Jembatan	1.500.000.000,00	
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan					Pembangunan Jembatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Jembatan yang Dibangun	3 Jembatan	449.000.000.000,00	
1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan					Pemeliharaan Berkala Jembatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	1 Jembatan	1.000.000.000,00	
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	20 Km	2.500.000.000,00	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	20 Km	2.500.000.000,00	
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Km	10.200.000.000,00	Rehabilitasi Jalan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Km	3.000.000.000,00	
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Kutai	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2 Km	1.200.000.000,00	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 Km	1.500.000.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
		Kartanegara									
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Cakupan Pengembangan Jasa Kontruksi (SOP, Data, Layanan, Intruktur dan Tenaga Terampil/Ahli)	100%	950.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Cakupan Pengembangan Jasa Kontruksi (SOP, Data, Layanan, Intruktur dan Tenaga Terampil/Ahli)	100%	2.500.000.000,00	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Tenaga Terampil Yang Akan Mengikuti Pelatihan		700.000.000,00	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Tenaga Terampil Yang Akan Mengikuti Pelatihan	60 Orang	1.300.000.000,00	
1.03.11.2.01.0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis		Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	1 Dokumen	300.000.000,00	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	1 Dokumen	300.000.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1.03.11.2.01.0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis		Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	10 Orang	300.000.000,00	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	10 Orang	300.000.000,00	
1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis		Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000,00	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000,00	
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator,					Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator,	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan	60 Orang	600.000.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Teknisi atau Analis					Teknisi atau Analis		Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih			
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Yang Telah Dibuat	2	250.000.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Yang Telah Dibuat	2	300.000.000,00	
1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi		Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	150.000.000,00	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	200.000.000,00	
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000,00	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000,00	
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)					Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)		Jumlah Dokumen Yang Disusun	1 dokumen	300.000.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1.03.11.2.03.007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota					Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	300.000.000,00	
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi					Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Pengawasan Dokumen Badan Usaha yang Tertib Jasa Konstruksi	10 Paket Pekerjaan	600.000.000,00	
1.03.11.2.04.004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota					Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	10 Paket Pekerjaan	400.000.000,00	
1.03.11.2.04.006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan					Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan,	25 Lembaga	200.000.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Produk Jasa Konstruksi					Produk Jasa Konstruksi		dan Tertib Pemanfaatan Produk			
Total Pendanaan:					126.680.395.056,00					820.445.043.149,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten.

Sehingga semua kegiatan yang dilakukan harus bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyrakat khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun, semua usulan-usulan tersebut perlu ditelaah dan disaring berdasarkan skala prioritas mana yang lebih dulu harus dikerjakan sehingga anggaran yang ada dapat digunakan secara efisien dan efektif dan akan langsung diteruskan ke masing-masing Perangkat Daerah yang terkait dan akan di temukan di dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan yang akan melibatkan seluruh Stake Holder Pemerintahan dalam menentukan program-program prioritas pembangunan kedepannya.

Adapun usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Ketimpangan ketersediaan infrastruktur antar-kawasan di Kabupaten Kutai Kartanegara, penyelenggaraan otonomi daerah, perubahan iklim dan efisiensi aparat Dinas Pekerjaan Umum adalah isu strategis utama yang menjadi perhatian di dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum. Ketimpangan ketersediaan infrastruktur antar-kawasan di Kabupaten Kutai Kartanegara telah mendorong tingginya arus urbanisasi menuju daerah perkotaan. Sudah sama-sama dipahami bahwa kota adalah mesin pertumbuhan ekonomi sehingga proses pengembangan wilayah terjadi karena adanya perkembangan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang kemudian diikuti dengan penyebaran pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitarnya. Sehingga sudah menjadi wajar apabila daerah-daerah perkotaan selalu memiliki daya tarik yang kuat bagi penduduk yang berada di luar kota tersebut. Dinas Secara administratif, Kabupaten Kutai Kartanegara terbagi dalam 18 wilayah kecamatan dan 237 desa/kelurahan. Dengan pertumbuhan penduduk 3,92% per tahun, penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 645.817 jiwa (2014) dengan kepadatan penduduk rata-rata 24 jiwa/km2 (sumber KutaiKartanegara.com).

Tingkat urbanisasi yang tinggi ini belum disertai dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk oleh urbanisasi tersebut maupun kesenjangan antara rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan (backlog) yang telah ada sebelumnya. Demikian juga ketersediaan infrastruktur belum merata dan menjangkau semua golongan masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Dari sisi otonomi daerah, sejak bergulirnya pada tahun 1998, hingga saat ini. Melalui otonomi, pemerintahan daerah memiliki keleluasan yang lebih luas dalam mengelola

daerahnya sendiri, namun kemampuan daerah untuk melakukan pengelolaannya tidaklah merata pada semua daerah. Ada daerah yang memiliki kemampuan yang sudah sangat baik dan memadai dalam mengelola daerahnya, namun masih banyak daerah yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang sangat rendah dalam pengelolaan daerahnya. Hal ini membawa masalah tersendiri, terutama bagi daerah-daerah yang belum memiliki kemampuan yang memadai dalam mengembangkan daerahnya.

Menghadapi tantangan tersebut, perlu pendekatan pembangunan yang bersifat kewilayahan yang terencana secara matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan ekonomi dan sosial serta ketersediaan infrastruktur suatu wilayah agar infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dapat mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah secara efektif dan efisien.

Beranjak pada isu yang mulai merebak hangat di kalangan dunia internasional, yaitu isu pemanasan global dan perubahan iklim, pola pembangunan pekerjaan umum dan permukiman juga dihadapkan pada tuntutan untuk mengurangi semaksimal mungkin dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan tersebut, seperti emisi gas rumah kaca dan kegiatan yang mendorong deforestasi.

Dari sisi internal Dinas Pekerjaan Umum, kapasitas dan kemampuan institusi ke-PU-an haruslah ditingkatkan dan disesuaikan dengan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kinerja aparatur pemerintah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel. Untuk itu pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan good government haruslah terus dilaksanakan di lingkungan instansi ke-PU-an di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penggalian isu strategis tidak bisa lepas dari kerangka acuan perencanaan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025, tahun 2021-2026 merupakan periode RPJMD keempat dimana mengusung visi Terwujudnya Kutai

Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia.

Berdasarkan Arah pembangunan periode RPJMD yang menjadi titik berat yaitu :

1. Menuju masyarakat Kutai Kartanegara yang SEJAHTERA dan BAHAGIA
2. Dukungan persiapan pembangunan IKN
3. Pengembangan kualitas sumber daya manusia
4. Penataan infrastruktur daerah yang terintegrasi antara spasial dan fungsional
5. Pengelolaan sumber daya alam berbasis lingkungan
6. Percepatan pembangunan wilayah desa dan kecamatan

Frase utama arah pembangunan periode RPJMD tersebut kemudian dirumuskan menjadi tema pembangunan. Tema-tema tersebut digunakan untuk lebih memudahkan dalam rangka penggalian permasalahan pembangunan dan isu strategis dalam rangka penyusunan bahan kebijakan perencanaan bagi kepala daerah melalui visi dan misinya.

Adapun misinya adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani;
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya;
3. Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonimi kreatif;
4. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah;
5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah. Arah kebijakan tersebut meliputi 6 aspek, yaitu

a) Arah kebijakan pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah;
b) Arah kebijakan pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan. Pengembangan Kawasan Perkotaan difokuskan

untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisikpotensi ekonomi dan budaya lokal;

c) Arah kebijakan peningkatan keterkaitan Perkotaan dan Perdesaan adalah peningkatan keterkaitan desa-kota yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dengan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi;

d) Arah kebijakan pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Pengembangan daerah tertinggal difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik, serta pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis;

e) Arah kebijakan penanggulangan bencana adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana;

f) Arah kebijakan dan strategi tata kelola Pemerintahan meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah; dan peningkatan kapasitas keuangan daerah;

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, maka Dinas Pekerjaan Umum merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang lebih jelas menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya visi dan tercapainya misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun tujuan Pekerjaan Umum jangka menengah adalah sebagai berikut :

Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar

Dengan sasaran pembangunan infrastruktur jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Aksebilitas Jalan Kabupaten
2. Meningkatnya Kondisi Bangunan Negara dalam Kondisi Baik
3. Meningkatkan Layanan Air Bersih dan Sanitasi
4. Meningkatnya kualitas layanan irigasi & penanganan banjir

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025, secara garis besar dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
2. Mempedomani RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Klartanegara Tahun 2021-2026
3. Mempedomani Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021-2026 dimana kemudian dilakukan penyesuaiannya didalam dokumen Rencana Kerja (RENJA) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya

5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan
6. Mempertimbangkan pelaksanaan tugas dan fungsi internal Dinas Pekerjaan Umum yang dicerminkan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

b. Rekapitulasi Program

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Jumlah Program yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebanyak 7 (Tujuh) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Sumber Adaya Air (SDA), Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengembangan Jasa Konstruksi
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebanyak 16 (enam belas) kegiatan
3. Jumlah Sub Kegiatan akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebanyak 66 (enam puluh enam) Sub Kegiatan.
4. Jumlah Kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2025 sebesar Rp. 820.445.043.149,00 *(Delapan Ratus Dua Puluh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah)* yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

c. Rumusan Program dan Kegiatan memiliki beberapa sub kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD dikarenakan beberapa hal antara lain :

1. Adanya tambahan sub kegiatan baru menyesuaikan dengan analisis kebutuhan dan paket pekerjaan
2. Adanya penyesuaian indikator, target dan satuan pada sub kegiatan

d. Tabel Rencana Program, Kegiatan dan sub kegiatan

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025 disertai indikator serta sumber pendanaan tersaji pada tabel 3.3.

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		71,25	75.554.757.250,00	APBD		72,5	39.432.268.695,00
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			250.000.000,00	APBD			100.000.000,00
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Kutai Kartanegara	5 Laporan	250.000.000,00	APBD		100 persen	100.000.000,00
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				43.194.757.250,00	APBD			34.235.565.759,00
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	336 Org	42.544.757.250,00	APBD		100 persen	33.885.565.759,00
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	650.000.000,00	APBD		100 persen	350.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				225.000.000,00	APBD			225.000.000,00
1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	2 Laporan	225.000.000,00	APBD		100 persen	225.000.000,00
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.650.000.000,00	APBD			200.000.000,00
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Kartanegara	50 Paket	150.000.000,00	APBD			
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	200 orang	1.500.000.000,00	APBD		100 persen	200.000.000,00
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.035.000.000,00	APBD			965.000.000,00
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	3 paket	1.000.000.000,00	APBD		100 persen	275.000.000,00
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	2 paket	335.000.000,00	APBD		100 persen	100.000.000,00
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	25 Laporan	1.000.000.000,00	APBD		100 persen	500.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1000 dokumen	700.000.000,00	APBD		100 persen	90.000.000,00
1.03.01.2.07	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah				9.000.000.000,00	APBD			
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	31 Unit	1.000.000.000,00	APBD			
1.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	3 unit	8.000.000.000,00	APBD			
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				15.350.000.000,00	APBD			3.091.702.936,00
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	36 Laporan	5.000.000.000,00	APBD		100 persen	100.000.000,00
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	7 Laporan	2.100.000.000,00	APBD		100 persen	566.879.448,00
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	8 Laporan	8.250.000.000,00	APBD		100 persen	2.424.823.488,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.850.000.000,00	APBD			615.000.000,00
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara	29 Unit	600.000.000,00	APBD		100 persen	450.000.000,00
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		27	1.450.000.000,00	APBD			
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		2	300.000.000,00	APBD			
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	3 Unit	500.000.000,00	APBD		100 persen	165.000.000,00
1.03.02.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER ADAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi			219.024.970.218,00	APBD		0,85	29.650.000.000,00
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten				APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten				APBD			
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				128.356.589.199,00	APBD			16.850.000.000,00
1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara	5 KM	7.906.589.199,00	APBD		5000 meter	650.000.000,00
1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara	2 Unit	200.000.000,00	APBD		2 unit	200.000.000,00
1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara	2 Unit	500.000.000,00	APBD		4 Unit	500.000.000,00
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Kab. Kutai Kartanegara	8 Km	12.500.000.000,00	APBD		4000 meter	2.000.000.000,00
1.03.02.2.01.0104	Pembangunan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dibangun	Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	1.000.000.000,00	APBD		1 Unit	1.000.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang bangunan pengaman pantai	Kab. Kutai Kartanegara	1200 Meter	15.000.000.000,00	APBD		1.500 meter	3.000.000.000,00
1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	9.500.000.000,00	APBD		1 Unit	9.500.000.000,00
1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	Kab. Kutai Kartanegara	1 Km	50.000.000.000,00	APBD			
1.03.02.2.01.12	Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	Kab. Kutai Kartanegara	1 Km	20.000.000.000,00	APBD			
1.03.02.2.01.19	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun	Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	10.000.000.000,00	APBD			
1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	3 Unit	1.750.000.000,00	APBD			
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				90.668.381.019,00	APBD		85 persen	12.800.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.02.2.02.35	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	1.000.000.000,00	APBD		1 dokumen	500.000.000,00
1.03.02.2.02.03	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Kab. Kutai Kartanegara	1 Bendung	2.500.000.000,00	APBD		1 unit	2.500.000.000,00
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Kab. Kutai Kartanegara		77.000.000.000,00	APBD		3200 meter	4.000.000.000,00
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	5 Km	3.000.000.000,00	APBD		10.000 meter	3.000.000.000,00
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		10 Km	6.368.381.019,00	APBD		15.000 meter	2.500.000.000,00
1.03.02.2.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara	4 Bendung	300.000.000,00	APBD		4 unit	300.000.000,00
1.03.02.2.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	500.000.000,00	APBD			
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				25.000.000.000,00	APBD			-
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung				25.000.000.000,00	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Kab. Kutai Kartanegara	0,75	20.000.000.000,00	APBD			
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara	5	5.000.000.000,00	APBD			
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung		62,46	138.564.266.650,00	APBD		62,23 persen	10.343.126.361,00
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			138.564.266.650,00	APBD		50 Bh	10.343.126.361,00
		Jumlah Bangunan Gedung yang dapat digunakan						3 unit	
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Kab. Kutai Kartanegara	12 Bangunan Gedung	135.699.266.650,00	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab. Kutai Kartanegara	205 Dokumen	1.290.000.000,00	APBD		4 dokumen	950.000.000,00
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	125.000.000,00	APBD			
1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	1.450.000.000,00	APBD			
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan yang dapat digunakan	Kab. Kutai Kartanegara					3 Unit	9.393.126.361,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya			902.242.142.775,00	APBD		67,11 persen	2.380.000.000,00
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				902.242.142.775,00	APBD			2.380.000.000,00
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	jumlah bangunan dan lingkungan yang ditata						1 unit	1.680.000.000,00
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	jumlah bangunan dan lingkungan yang dipelihara						1 unit	700.000.000,00
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kab. Kutai Kartanegara	77 Kawasan	900.917.142.775,00	APBD			
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	50 Dokumen	1.325.000.000,00	APBD			
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan		0,6495	3.219.795.428.571,43	APBD		0,6495	40.150.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten		1.424,39 Km	3.219.795.428.571,43	APBD		1.424,39 Km	40.150.000.000,00
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD		3 dokumen	1.450.000.000,00
1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Digant	Kab. Kutai Kartanegara	6 Jembatan	69.700.000.000,00	APBD		1 Unit	13.500.000.000,00
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Kab. Kutai Kartanegara	260,46	2.161.320.000.000,00	APBD		2 Km	10.000.000.000,00
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Kab. Kutai Kartanegara	3	20.000.000.000,00	APBD		3 Km	7.500.000.000,00
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Kab. Kutai Kartanegara	20	2.500.000.000,00	APBD		2 dokumen	2.500.000.000,00
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	1	87.665.000.000,00	APBD		1 Km	4.000.000.000,00
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Kab. Kutai Kartanegara	2	3.000.000.000,00	APBD		2 Km	1.200.000.000,00
1.03.10.2.01.0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan,	Kab. Kutai Kartanegara	16	10.839.000.000,00	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian							
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	Kab. Kutai Kartanegara	6.17	256.000.000.000,00	APBD			
1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang dilakukan pelebaran menuju standar	Kab. Kutai Kartanegara		81.971.428.571,43	APBD			
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	Kab. Kutai Kartanegara		511.500.000.000,00	APBD			
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan rehabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara		4.000.000.000,00	APBD			
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan rutin	Kab. Kutai Kartanegara		2.500.000.000,00	APBD			
1.03.10.2.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	Kab. Kutai Kartanegara		8.000.000.000,00	APBD			
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah kegiatan yang diselenggaraan Jalan/Jembatan			400.000.000,00	APBD			
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan Pengembangan Jasa Kontruksi (SOP, Data, Layanan, Intruktur dan Tenaga Terampil/Ahli)		1	950.000.000,00	APBD		1	950.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Yang Akan Mengikuti Pelatihan		20	700.000.000,00	APBD		20	700.000.000,00
1.03.11.2.01.0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan		1	300.000.000,00	APBD		20 orang	300.000.000,00
1.03.11.2.01.0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan		10	300.000.000,00	APBD		10 orang	300.000.000,00
1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan		1	100.000.000,00	APBD		1 Bh	100.000.000,00
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Yang Telah Dibuat		3	250.000.000,00	APBD		3	250.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan			150.000.000,00	APBD		1 Bh	150.000.000,00
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan			100.000.000,00	APBD			100.000.000,00
					4.581.131.565.464,43				122.905.395.056,00

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan kebinamargaan yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi RENJA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Semoga RENJA tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun-tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala- kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

a. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Prangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diantaranya memuat kebijakan, program,dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan dirumuskannya Rencana Kerja Tahun 2025 ini, akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai tahun 2025.

Dokumen Rencana Kerja yang memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya dan program, kegiatan serta rencana capaiannya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja.

Dengan demikian diharapkan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara akan terlaksana dengan upaya meningkatkan kinerja SKPD, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 khususnya dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan harus memenuhi beberapa kaidah sebagai berikut :

a. Sinergi Regulasi : diarahkan untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri sehingga dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKP tahun berjalan dalam koridor RPJMN Tahun 2022-2026 . selain itu, sinergi juga diarahkan untuk meningkatkan kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan
b. Sinergi Perencanaan : dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan

dalam tahap perencanaan, RENJA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 harus bersinergi dengan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Sinergi dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah baik tahunan maupun lima tahunan dalam pelaksanaan dengan mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan pemerintah (Kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional) sehinggah terwujud sinkronisasai antara kebijakan, program dan kegiatan antar sektor, antar waktu, antar wilayah, dan antar pusat dan daerah

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi didalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, maka diperlukan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan dan usulan dari kelurahan dan kecamatan serta usulan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terbitnya permendagri No. 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 sebagai berikut :

1. Di dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang. Hal ini di karenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

2. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Kalimantan Timur, maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya, diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Renstra Dinas).

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur;
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang
3. Menerapkan system reward and punishment terhadap seluruh pegawai untuk peningkatan kinerja pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif didalam melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait, agar proses pembangunan yang dilaksanakan mencapai target yang diharapkan;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud;
6. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila mengacu pada jadwal yang ditetapkan.
7. Taat azas dalam melaksanakan semua kegiatan dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.

Demikian Rancangan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 ini disusun, semoga dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi kita semua.

1.RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan Dokumen yang merupakan yang berisi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan autcome yang ingin di wujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaa, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah, dan Recana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya muwujudkan perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat, Renja ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.Kukar Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi

dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3 Maksud Dan Tujuan

1. Maksud :

   Maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah :

   1. Menetapkan Dokumen Rencana yang memuat program dan kegiatan Tahun 2025, dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.
   2. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2025.
   3. Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2025.

2. Tujuan :

   Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai KartanegaraTahun 2025 adalah :

1. Mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara dalam rencana kegiatan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
2. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program,kegiatan,dan sub kegiatan pada tahun 2025.
3. Merencanakan pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), sebelum di tetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perkim tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan renja perangkat daerah, keterkaitan antara renja perangkat daerah dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan tindaklanjutnya dengan proses RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang UU,PP,Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang di jadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

2.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

2.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok Bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA – PD TAHUN LALU

Berisi tentang : Evaluasi Renja-PD tahun lalu sampai dengan Triwulan IV dan perkiraan capaian tahun berjalan yang disajikan di Tabel 29, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang disajikan dengan Tabel 30, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD di sajikan di Tabel 31.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan sasaran Renja PD.

BAB IV : RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi Tentang :

4.1 Faktor- yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan

4.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi program dan kegiatan

4.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

BAB V : PENUTUP

Memuat Catatan, Kaidah-kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja - PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 berdasarakan realisasi kinerja anggaran adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Program/Kgiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   Sampai dengan akhir triwulan IV tahu 2023 tidak ada realisasi program yang tidak memenuhi target / semua program tercapai.

2. Realisasi Program/Kgiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

      - Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran Sebesar Rp352.311.951.066,- dan realisasi keuangan sebesar Rp338.308.064.717,- dan sisa anggaran sebesar Rp14.003.886.349,- dengan capaian kinerja program 100% dan persentase realisasi keuangan 96,03%.

   b. Program Pengelolaan dan Pengembanga Sistem Air Limbah

      Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp31.124.479.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp29.486.508.326,- dan sisa anggaran sebesar Rp1.637.970.674,- dengan capaian kinerja program 100% % dan persentase realisasi keuangan 94,73%

   c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

      Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp90.470.991.571,- dan realisasi keuangan sebesar Rp82.573.301.530,- dan sisa anggaran sebesar Rp7.897.690.041,- dengan capaian

kinerja program 100% dan persentase realisasi keuangan 91,27%,

d. Program Pengembangan Perumahan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp10.566.929.560,- dan realisasi keuangan sebesar Rp9.739.561.561,- dan sisa anggaran sebesar Rp827.367.999,- dengan capaian kinerja program 100% dan persentase realisasi keuangan 92,17%,

e. Program Kawasan Permukiman

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp4.113.615.440,- dan realisasi keuangan sebesar Rp2.186.134.500,- dan sisa anggaran sebesar Rp1.927.480.940,- dengan capaian kinerja program 100% dan persentase realisasi keuangan 53,14%.

f. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp59.952.066.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp32.602.134.700,- dan sisa anggaran sebesar RP27.349.931.300 dengan capaian kinerja program 100% dan persentase realisasi keuangan 54,38% .

g. Program Peningkatan Prasarana,sarana dan utilitas Umum

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran Sebesar Rp202.291.281.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp173.306.848.322,- dan sisa anggaran sebesar Rp28.984.797.178 dengan capaian kinerja program 100% dan realisasi keuangan 85,67%

3. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program /kegiatan antara lain;

a) Pemahaman tentang Pentingnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada perangkat daerah masih rendah

b) Masih rendahnya kesadaran dari perangkat daerah dalam pemanfaatan aplikasi e-pantau dalam rangka peningkatan

kualitas pengendalian dan evaluasi sebagai bahan pendukung penyusunan rekomendasi kebijakan

c) Ketersediaan data yang belum akurat oleh beberapa PD sehingga kesulitan melakukan proyeksi dalam penyusunan rencana kerja

4. Implikasi yang timbul terhadap tercapainya target program Renstra Perangkat,

   Beberapa hal yang diharapkan dari hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilakukan dapat membawa dampak yang positif pada pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

5. Kebijakan / tindakan perencanaa dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;

   a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur perencanaan yang adaptif terhadap kemajuan teknologi dan informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek,pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana

   b. Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi capaian kinerja secara rutin dan berkala (minimal 3 bulan sekali) dalam rangka meningkatkan capaian target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.

   c. Tetap Konsisten mengawal ketercapaian program/kegiatan melalui evaluasi dokumen perencanaan, pengendalian kegiatan dan SPIP

Berikut ini adalah Tabel Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Triwulan IV tahun 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel TC. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja - PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6 *100)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		95	89,32 Persen 0,54 Persen	90,74 Persen	96,03 Persen	106 106	92,16 persen 1 persen	278 189	3 0
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	19	3 Paket	8 Paket	96,03 Persen	1.200		99	5
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun		11 Dokumen	45 Dokumen	81,58 Persen	181	1 Dokumen	94	-

1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	-	0		-		-		-	-	-
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Kapasitas SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang dibangun	250	1	Paket	337,5	Liter/Detik	96,67	Persen	28,64		98	0
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Kapasitas SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang dibangun	32,5			1.743	SR	97,34	Persen	5,58		97	3
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	0	9	Paket	230	Liter/Detik	103,44	Persen	44,97		112	-
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Kegiatan	13	3	Kegiatan	53,5	Liter/Detik	96,71	Persen	180,77		100	8
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	0	3	Kegiatan	50	SR	95,53	Persen	191,06		99	-
1.03.03.2.01.08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		0	-		-		-		-		-	-

1.03.03.2.01.09	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum	0	-	-	-	-		-	-
1.03.03.2.01.10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Jumlah Badan Usaha yang Menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	0	-	-	-	-		-	-
1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	0	-	-	-	-		-	-
1.03.03.2.01.12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	0	-	-	-	-		-	-
1.03.03.2.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama	0	-	-	-	-		-	-
1.03.03.2.01.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	0	-	-	-	-		-	-

1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	0	-	-	-	-		-	-
1.03.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	0	-	-	-	-		-	-
1.03.03.2.01.17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Tandon Jumlah lahan yang tersedia	1.000 5	2 Paket 1.346 Unit Rumah	6.975 Rumah Tangga	91,39 Persen	1 1		93 1.437	0 287
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Sambungan Panjang Pipa Terpasang	500 30	773 Unit 2.000 Meter	5.486 SR	97,13 Persen	2 2		870 2.097	2 70
1.03.03.2.01.20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Teroptimalisasinya SPAM Jaringan Perpipaan	0	-	-	-	-		-	-
1.03.03.2.01.21	Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Teroptimalisasinya SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	0	-	-	-	-		-	-
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	90	83,4 Persen	85 Persen	94,73 Persen	111,44	86,70 Persen	283	3

1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket pekerjaan	285	5	Unit	686	Unit	94,74	Persen	14	Unit	100	0
		Jumlah Sanitasi	0	631	Paket	-		-		-		631	-
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	8	7	Dokumen	0		95,56		-		103	13
1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan/Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	0	40	Dokumen	0		0		-		-	-
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Unit Pengolahan Terpusat	60	-		0		0		0		-	-
1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	0	-		0		0		0		-	-
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah sapras sanitasi	81	691	Unit	686	Rumah Tangga	99,99	Persen	14,58		791	10

1.03.05.2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	0	-	0	0 Persen	0		-	-
1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kecamatan / Desa (Kegiatan)	4	25 Kelompok	0	65,60 Persen	0		91	23
1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta	80	-	0	0 Persen	0		-	-
1.03.05.2.01.10	Operasional dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	4	-	0	0 Persen	0		-	-
1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	0	-	0	0 Persen	0		-	-
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah SPAL-T Skala Permukiman	4	1 Paket	0	0 Persen	0		1	0

1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Tersedia	4	1	Unit	0	0	Persen	0	1	Unit	2	1
1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	120	-		100 Rumah Tangga	52,51	Persen	52,51	55	Rumah Tangga	108	1
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Sarana dan Prasarana IPLT yang terbangun/tersedia	400	1	Kegiatan	0	0	Persen	0	0		1	0
1.03.05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	0	-		0	0	Persen		0		-	-
1.03.05.2.01.17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	0	-		0	0	Persen	0	0		-	-
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar								1176	Rumah tangga	1.176	

1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)							5	orang	5	
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun							10	dokumen	10	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,5	70,5	Nilai	94	Nilai	91,27 Persen	9,71	0		162	2
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45	9	Dokumen	9	Dokumen	54,41 Persen	605	10	Dokumen	73	2
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	3	Dokumen	7	Dokumen	46,88 Persen	670	5	Dokumen	50	2

1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	3	Laporan	1	Laporan	45,82	Persen	4.582	2	Laporan	49	10
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	3	Dokumen	1	Laporan	78,66	Persen	7.866	3	Laporan	82	5
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	20	4	Laporan	4	Laporan	93,06	Persen		5	Laporan	97	5
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	12.180	12220	Bulan Orang	2.397	Orang / Bulan	93,55	Persen	3,90	2340	Orang / Bulan	326	0
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1	Dokumen	1	Laporan	36,37	Persen	3637	1	Laporan	37	7
1.04.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	70	5	Kali	1	Dokumen	47,63	Persen	4763	2	Dokumen	53	1
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	3	Dokumen	12	Laporan	94,61	Persen	788	12	Laporan	98	2

1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	5	1	Dokumen	1	Dokumen	77,68	Persen	7768	1	Dokumen	80	16
1.04.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	5	1	Dokumen	1	Laporan	77,68	Persen	7768	1	Laporan	80	16
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	10	2	Dokumen	2	Dokumen	95,11	Persen	48	2	Dokumen	99	10
1.04.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai	5	1	Laporan	1	Dokumen	68,85	Persen	6.885	1	Dokumen	70	14
1.04.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	1	Laporan	1	Dokumen	87,64	Persen	8.764	1	Dokumen	89	18
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35	7	Layanan	7	Layanan	88,78	Persen	1268,29	7	Layanan	103	3
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	225	45	Jenis	1	Paket	97,86	Persen	9786	1	Paket	143	1
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12.500	2500	Porsi	3	Paket	97,17	Persen	3239	1	Paket	2.597	0
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	75.550	151100	Lembar	1	Paket	99,74	Persen	9974	1	Paket	151.200	2

1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	31.670			3	Dokumen	59,07	Persen	1969	1	Dokumen	59	0
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	325	65	Kali	200	Laporan	74,08	Persen	37,0	125	Laporan	139	0
1.04.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	1.250	1	Berkas	250	Dokumen	87,83	Persen	35	568	Dokumen	89	0
1.04.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	5	1	Sistem	1	Dokumen	99,55	Persen	9955	0	Dokumen	101	20
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	40	-		702	Unit	95,64	Persen	14	263	unit	96	2
1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	40	8	Jenis	681	Unit	98,49	Persen	14,5	203	Unit	106	3
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60	12	Bulan	12	Bulan	100	Persen	833	12	Bulan	112	2

1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	12	Bulan	12	Laporan	100	Persen	833	12	Laporan	112	2
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2. Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	60	12 12	Bulan Bulan	12	Laporan	100	Persen	833	12	Laporan	124	2
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diperlihara	575	116	Unit	475	Unit	100	Persen	21,05	285	unit	216	0
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	180			31	Unit	100	Persen	322,58	55	Unit	100	1
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	245	85	Unit	83	Unit	100		120	0	Unit	185	1
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	150	50	Unit	358	Unit	100	Persen	28	85	Unit	150	1

1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	2			2	Unit	100	Persen	5.000	2	Unit	100	50
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	1	1	Unit	1	Unit	100	Persen	10000	1	Unit	101	101
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1. Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana	100	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	300	3
		2. Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	300	3
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ Relokasi Program Kabupaten	67	15	Dokumen	12	Dokumen	100	Persen	833	6	Dokumen	121	2
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan	22	1	Dokumen	4	Dokumen	100	Persen	2.500	1	Dokumen	102	5

1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Identifikasi Lahan-lahan Potensial	5	1	Dokumen	3	Dokumen	100	Persen	3.333	1	Dokumen	102	20
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana	20	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Persen	10.000	1	Dokumen	102	5
1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Pendataan Tingkat Kerusakan	5	0		-	Dokumen	100	Persen	-	1	Dokumen	101	20
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Verifikasi	10	1	Dokumen	3	Dokumen	100	Persen	3.333			101	10
1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	5	1	Paket	1	Dokumen	100	Persen	10.000	1	Dokumen	102	20
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota									1	Dokumen		
1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi									1	Dokumen		

1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten	4	0		1	Kegiatan	100	Persen	10000	1 Kegiatan	101	25
1.04.02.2.02.04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Kegiatan Pelatihan	4	0		10	Orang	100	Persen	1000	10 Orang	110	28
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang dibangun/direhab	157	35	Unit	36	Unit	100	Persen	277,8	35 Unit	170	1
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana yang direhab	25	5	Unit	6	Unit Rumah	100	Persen	1667	5 Unit Rumah	110	4
1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyusunan Site Plan /DED bagi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten	10	2	Dokumen	2	Dokumen	100	Persen	5000		102	10
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun									1 Unit Rumah	1	
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten yang terbangun	132	29	Unit	30	Unit Rumah	98,82	Persen	329,40		128	1

1.04.02.2.03.06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	10	1	Paket	1	Unit Rumah	100	Persen	10000	2	Unit Rumah	103	10
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	53,67	31,77	Persen	37,25	Persen	100	Persen	268	42,7	Persen	174	3
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	5	1	Dokumen	2	Dokumen	100	Persen	5.000	1	Dokumen	102	20
1.04.03.2.02.0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh									1	Laporan	1	
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Review Bidang PKP	5	1	Dokumen	2	Dokumen	100	Persen	5000	1	Dokumen	102	20
1.04.03.2.03	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Area	10	0,76	Hektar (Ha)	6	Hektar (Ha)	100	Persen	1.667	9,44	Hektar (Ha)	110	11
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH	100	15	Unit Rumah	11	Unit Rumah	100	Persen	909	20	Unit Rumah	135	1

1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Area	10	0,76	(Hektar) Ha	6	(Hektar) Ha	100	Persen	1667	9,44	Ha	110	11
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1. Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	6,1	7,2	Persen	1010	Unit	100	Persen	10	517	unit	624	87
		2. Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN	2585	517	Unit	7	Persen	100	Persen	1.429	7	persen	624	0
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang direnovasi	2585	517	Unit	1010	Unit	100	Persen	10	517	Unit	1.134	0
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah RTLH yang diperbaiki	2585	517	Unit	1010	Unit Rumah	100	Persen	9,90	517	Unit rumah	1.134	0
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	4,11	4,92	Persen	0		100	Persen	-	4,48	Persen	109	27
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	19,68	3,95	Persen	0		100	Persen	0	11,81	Persen	116	6

1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	19	2	Dokumen	10	Dokumen	100	Persen	1000	0	Dokumen	2	0
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Panjang Jalan / Jembatan, Jalan Lingkungan Permukiman dan Saluran Drainase, Gorong - Gorong Yang Terbangun	1285	5818	Meter	217	Lokasi	100	Persen	46,083	131	Lokasi	6.049	5
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah laporan hasil serah terima PSU perumahan yang terverifikasi dari pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang								1	Laporan	1	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah di tentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021. Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terapkan pada Urusan Wajib Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk urusan Pemerintah Lainnya daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar indikator kinerja. Dalam penerapannya, Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar daerah dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh kebutuhan pokok Air minum sehari-hari	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh Kabupaten/Kota	89,32	90,74	92,16	93,58	95	76,68	82,18	92,16	93,58	
			Persentasi Penyediaan SPAM Perdesaan	0,54	0,7	1,03	1,26	1,48	0,32	0,84	1,04	1,30	

2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat layanan pengelolaan Air Limbah Domestik	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	83,37	85	86,70	88,34	90	76	83.48	86,70	88,34	
3	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Hunian untuk penyedian dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah Warga Negara yang terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan Rumah Layak Huni	Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari hasil analisis kinerja pelayanan perangkat daerah,permasalahan dan hambatan yang di hadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Secara umum tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah
    a. Berdasarkan kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukimanterhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja tahun 2023 maupun Renstra 2021-2026 sudah cukup baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
    b. Hasil evaluasi SAKIP yang merupakan evaluasi menghitung Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah.Salah satu komponen penilaian evaluasi SAKIP adalah pada sisi perencanaan, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam meningkatkan capaian, dimana dalam hal ini berkaitan dengan peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam mendukung visi dan misi kabupaten dalam menyukseskan perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan darah.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain:
    a. Belum maksimalnya penyusunan dokumen perencanaan, kurangnya ketelitian dan kecermatan dalam penyusunan dokumen, kurangnya data yang cukup memadai
    b. Terdapat perubahan regulasi dari pusat yang menyebabkan perlunya penyesuaian pada dokumen perencanaan diantaranya:diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah

   Dalam mewujudkan visi dan misi bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, secara umum Dinas Perumhan dan Kawasan Permukiman memiliki konstribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian kelima misi yang ditetapkan.

   Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman fokus pada misi poin 4 yaitu “Meningkatkan Kulitas Layanan Infrastruktur Dasar dan KonektivitasKartanegara antar Wilayah”.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

   a. Tantangan :

      1. Pengelolaan dan Penyajian data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan mutakhir.
      2. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah cukup dinamis, yang menuntut sumber daya aparatur pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

   b. Peluang

      1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tidak terbatas, harus dimanfaatkan dengan maksimal dan tepat sasaran, guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan Pembangunan daerah secara transparan,cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
      2. Regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan Pembangunan daerah Dimana regulasi dan kebijakan yang terkait perencanaan Pembangunan perencaan Pembangunan daerah di samping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan Pembangunan daerah.

5. Formulasi isu-isu

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan sebagai berikut :

a) Penyusunan dokumen perencanaan sesuai regulasi.
   1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), khususnya yang berkaitan dengan bidang perencanaan
   2. Menindaklanjuti hasil evaluasi dan review dokumen perencanaan
   3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh pihak terkait lainnya termasuk antar bidang di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

b) Pengoptimalan Penyediaan Data dan Informasi

   Ketersediaan data dan informasi yang berkualitas memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Penyediaan data dan informasi ini dapat dilakukan dengan menghimpun, mengelola serta mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sumber diantaranya data dan informasi hasil kajian, data dan informasi evaluasi hasil perencanaan.

c) Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, dan juga kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan.

   Ketersediaan air dan sanitasi yang menjadi *goals* keenam dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga melandasi pencapaian indikator kinerja yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, meskipun standar yang digunakan belum sepenuhnya mengikuti

standar yang ditetapkan oleh gugus tugas, yaitu proporsi rumah tangga dengan akses air minum (bukan air bersih); dan pengolahan limbah rumah tangga yang diolah sesuai dengan standar nasional.

Berangkat dari kondisi tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki konstribusi untuk mewujudkan SDM Kabupaten Kutai Kartanegara yang berdaya saing. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki tugas dan fungsi dalam penyediaan air bersih dan sanitasi Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berdampak langsung pada kesehatan fisik dan mental masyarakat dalam rangka mendukung perwujudan SDM Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkualitas dan memiliki daya saing.

Arah kebijakan pembangunan perumahan adalah meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai.

Beberapa tantangan dalam penyediaan perumahan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah antara lain:

1. Ketimpangan antara pasokan (supply) dan kebutuhan (demand).
2. Keterbatasan kapasitas pengembang (developer) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif.
3. Rendahnya keterjangkauan (affordability) MBR, baik membangun atau membeli rumah salah satu penyebab masih banyaknya MBR belum tinggal di rumah layak huni (Potensi Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh).
4. Pembangunan perumahan, khususnya di area perkotaan (urban area) terkendala dengan proses pengadaan lahan.
5. Peran pemerintah pusat dan daerah sebagai enabler masih lemah.

Arah kebijakan dan strategi di bidang perumahan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin, antara lain:

a. Pembangunan Pusat Layanan Informasi Berbasis Digital, contoh: RTLH dan Jalan Lingkungan Berbasis Geospasial
b. Pelatihan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
c. Pelatihan Kelompok Penerima Pemanfaat (KPP)
d. Pelatihan KP SPAM (Kelompok Pengelola SPAM)

e. Pembangunan SPAM
f. Peningkatan Jalan Lingkungan
g. Penyediaan LPJU untuk permukiman
h. Pembangunan SPAM
i. Peningkatan Jalan Lingkungan
j. Penyediaan LPJU untuk permukiman

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 memuat program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan RKPD.

Reviu terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hasil perbandinga tidak terdapat perbedaan indikator, namun pada target dan pagu indikatif terdapat beberapa perbedaan .

a. Adanya penambahan pada sub kegiatan
b. Adanya penambahan pagu indikatif
c. Adanya perubahan target capaian.

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dapat diuraikan pada tabel terlampir (tabel T-C.31)

Tabel TC.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dinas Perumahan dan Kawasan Kawasan Permukiman

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		1. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	93,58	Persen	41.267.187.755	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		1. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	93,58	Persen	91.513.234.158	
			2. Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan	1,26	Persen				2. Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan	1,26	Persen		

1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan			41.267.187.755	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	4	Paket	91.513.234.158	
1							Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	0	Unit	0	
2							Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1	Dokumen	1.200.000.000	
3	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Kutai Kartanegara	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	3	Liter/Detik	10.767.187.755	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Kutai Kartanegara	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	170	Liter/Detik	43.220.414.158	
4							Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	20	Desa	350.000.000	

5	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	257,5	Liter/Detik	27.500.000.000	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	27,5	Liter/Detik	20.400.000.000	
6	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1500	SR	3.000.000.000,00	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	7230	SR	25.842.820.000	
7							Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	2	unit	500.000.000	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	88,3	Persen	6.000.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	88,3	Persen	17.939.999.993	

1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah dengan akses Unit Pengolahan Setempat/Terpusat	51	Unit	6.000.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah dengan akses Unit Pengolahan Setempat/Terpusat	51	Unit	17.939.999.993	
1	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kab. Kutai Kartanegara	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	1	M^3/Hari	700.000.000	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kab. Kutai Kartanegara	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	0	M^3/Hari	0	
2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kab. Kutai Kartanegara	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	15	M^3/Hari	1.484.947.500	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kab. Kutai Kartanegara	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	0	M^3/Hari	0	
3	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	30	Rumah Tangga	168.750.000,00	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	0	Rumah Tangga	0	

4	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	20	Penyelenggara	110.651.250,00	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	0	Penyelenggara		
5	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kab. Kutai Kartanegara	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	100	M^3/Hari	750.000.000,00	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kab. Kutai Kartanegara	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	0	M^3/Hari	0	
6	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	1	Unit	675.000.000,00	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	0	Unit	0	
7	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	Unit	1.500.000.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	0	Unit	0	
8	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	0		0	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	388	Rumah Tangga	16.868.697.493	

9	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1	Orang	310.651.250,00	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	121	Orang	421.302.500	
10	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2	Dokumen	300.000.000,00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	4	Dokumen	650.000.000	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72	Nilai	54.108.812.417	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72	Nilai	39.275.982.684	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	Dokumen	225.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	Dokumen	1.100.000.000	

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	450.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	100.000.000	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	75.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	150.000.000	
4							PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumn	50.000.000	

5							PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	Data	250.000.000	
6							PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Berita Acara	100.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	4	Laporan	20.901.952.728	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	4	Laporan	21.021.462.065	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2400	Orang/bulan	20.451.952.728	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2400	Orang/bulan	20.571.462.065	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	25.000.000	

3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	14	Dokumen	50.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	14	Dokumen	50.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	Laporan	350.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	Laporan	350.000.000	
5							Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	25.000.000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1	Dokumen	50.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1	Dokumen	105.000.000	
1							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	25.000.000	

2							Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	50.000.000	
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	50.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	30.000.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2	Dokumen	100.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2	Dokumen	350.000.000	
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	50.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	50.000.000	
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	50.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	50.000.000	
3							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	Orang	250.000.000	

5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	Layanan	1.206.759.005	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	Layanan	3.726.759.005	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	250.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.100.000.000	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	200.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	200.000.000	
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	200.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	500.000.000	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6334	Dokumen	75.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	75.000.000	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65	Laporan	301.759.005	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65	Laporan	801.759.005	
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250	Dokumen	130.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250	Dokumen	1.000.000.000	

7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	50.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	50.000.000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	10	Unit	100.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	10	Unit	1.000.000.000	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	1.000.000.000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	29.425.100.684	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	8.814.761.614	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	934.342.080	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	4.034.342.080	

2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	28.490.758.604	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	4.780.419.534	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang diperlihara	118	Unit	2.100.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang diperlihara	118	Unit	3.158.000.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45	Unit	500.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45	Unit	1.900.000.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40	Unit	1.200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40	Unit	0	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	Unit	100.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	Unit	100.000.000	

4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	200.000.000	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	958.000.000	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		1. Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana	100	Persen	7.536.384.560	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		1. Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana	100	Persen	21.400.000.000	
			2. Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100	Persen				2. Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100	Persen		

1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ Relokasi Program Kabupaten	15	Dokumen	1.250.000.000	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ Relokasi Program Kabupaten	15	Dokumen	1.250.000.000	
1	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1	Dokumen	100.000.000	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1	Dokumen	100.000.000	
2	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	4	Dokumen	250.000.000	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	4	Dokumen	250.000.000	
3	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1	Dokumen	300.000.000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1	Dokumen	300.000.000	

4	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1	Dokumen	100.000.000	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1	Dokumen	100.000.000	
5	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	2	Dokumen	100.000.000	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	2	Dokumen	100.000.000	
6	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	6	Dokumen	400.000.000	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	6	Dokumen	400.000.000	
2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten	1	Kegiatan	100.000.000	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten	1	Kegiatan	100.000.000	

1	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas Tim Pendamping dan Fasilitator	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	1	Orang	100.000.000	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas Tim Pendamping dan Fasilitator	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	1	Orang	100.000.000	
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang dibangun/direhab	19	Unit	6.186.384.560	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang dibangun/direhab	19	Unit	19.850.000.000	
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5	Unit Rumah	200.000.000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5	Unit Rumah	200.000.000	
2	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	0	Unit Rumah	0	
3	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	2	Unit Rumah	836.384.560	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	0	Unit Rumah	0	

4	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	14	Unit Rumah	5.150.000.000	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Muai , Puan Cepak	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	30	Unit Rumah	19.650.000.000	
3							Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan perumahan		Jumlah Dokumen Perizinan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Dokumen	200.000.000	
1							Fasilitasi pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan terintegrasi secara elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	100.000.000	
2							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1	Laporan	100.000.000	

5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	48,19	Persen	1.113.615.440	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	48,19	Persen	5.613.615.440	
1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	1	Dokumen	500.000.000	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	1	Dokumen	500.000.000	
1	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1	Dokumen	500.000.000	Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1	Dokumen	500.000.000	
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Luas Area	2	Hektar (Ha)	613.615.440,00	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Luas Area	2	Hektar (Ha)	5.113.615.440	

1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20	Unit Rumah	263.615.440,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20	Unit Rumah	263.615.440	
2	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Kutai Kartanegara	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	2	Ha	350.000.000	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Kutai Kartanegara	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	2	Ha	4.850.000.000	
6	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		1. Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN	517	Unit	10.340.000.000	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		1. Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN	517	Unit	10.340.000.000	
			2. Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	6,4	Persen				2. Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	6,4	Persen		
1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah yang direnovasi	517	Unit	10.340.000.000	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah yang direnovasi	517	Unit	10.340.000.000	

1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	517	Unit Rumah	10.340.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	517	Unit Rumah	10.340.000.000	
7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	4,29	Persen	1.350.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	4,29	Persen	126.340.392.392	
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah Perumahan yang Terfasilitasi PSU	15,75	Persen	1.350.000.000	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah Perumahan yang Terfasilitasi PSU	15,75	Persen	126.340.392.392	
1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2	Dokumen	500.000.000	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2	Dokumen	1.400.000.000	

2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	257	Lokasi	850.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	79	Lokasi	124.840.392.392	
3							Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1	Laporan	100.000.000	
Jumlah						121.716.000.172						312.423.224.667	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan dan sub.kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan hasil rumusan perencanaan melalui Musrenbang
tingkat kabupaten.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD tingkat kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang
direncanakan.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kartanegara tidak memiliki kegiatan yang berhubungan langsung dengan para pemangku kepentingan, baik dari provinsi, LSM, Asosiasi maupun Perguruan tinggi.

Tabel TC.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Kutai kartanegara

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Cacatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	93,58	Persen	
			Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan	1,26	Persen	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	4	Paket	
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Kutai kartanegara	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	170	Liter/Detik	Musrenbang
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Kutai kartanegara	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	27,5	Liter/Detik	Musrenbang
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Kutai kartanegara	Jumlah Sambungan Rumah yang	7230	SR	Musrenbang

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Cacatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	Jaringan Perpipaan		terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	4,29	Persen	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	12,75	Persen	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Kutai kartanegara	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	79	Lokasi	Musrenbang, Pokir

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjangh, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam undang-undang tersebut terdapat 5 (Lima) tujuan Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Yaitu :

1. Untuk Mendukung Koordinasi antar pelaku Pembangunan;
2. Menjamin terciptanya Integritas, singkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu,dan antar fungsi pemerintah, serta antar pusat dan daerah:
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencana, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan:
4. Optimalisasi partisipasi masyarakat ; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja - PD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Penetapan tujuan dalam dalam renstra selain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan sasaran pembangunan yang yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Sesuai dengan Misi ke-4 yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah” yang kemudian diturunkan dalam tujuan Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Penataan Wilayah, dengan Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih dengan indikator sasaran Cakupan layanan air bersih dan Presentase Rumah Layak Huni.
2. Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah dengan indikator sasaran Indeks Aksesibiltas Wilayah.

Maka pada pencapaian Misi 4 (empat) dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 dapat dilihat bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada posisi tugas yang sesuai dengan sasaran ke-1 RPJMD dan di "Cascading" menjadi Tujuan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Meningkatkan Rumah Layak Huni yang Berkualitas dengan indikator kinerja Rasio Rumah Layak Huni.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Perangkat Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu 5 Tahun ke depan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan rumusan tujuan yang ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu " Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat" Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai.

Tabel 3.2

Target Indikator Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN Meningkatkan Rumah Layak Huni yang Berkualitas		Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0,25

	SASARAN Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	Persen	1,81
		Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	87,23

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program Dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansim pemerintah.

Perumusan Program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pembangunan Daerah.

a). Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam rangka merealisasikan janjinya kepada masyarakat, Bupati dan Wakil Bupati telah menetapkan Visi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka lima tahun ke depan, yaitu *"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia".* Untuk merealisasikan visi ini telah ditetapkan Misi yaitu:

Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan (2021-2026) dapat dirumuskan sebagai berikut : *"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia".* Visi tersebut mengandung dua elemen utama pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan masyarakat yang bahagia.

Untuk mencapai Visi tersebut diatas, Kabupaten Kutai Kartanegara memliki 5 (lima) kunci yang harus dilaksanakan yang tertuang didalam Misi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

1. Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;

3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mewujudkan visi, misi Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan fungsi, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara lebih fokus pada Misi Kabupaten Kutai Kartanegara poin 4 yaitu "Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah". Sementara itu, Misi pertama bersifat umum yang harus dilaksanakan oleh seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara.

Selain Visi dan Misi, pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih merumuskan filosofi pembangunan Kukar Tahun 2021-2024 yaitu Kukar Idaman. Idaman secara etimologi berarti sesuatu yang diharapkan, yang didambakan, yang dicita-citakan. Kukar Idaman adalah satu gerakan yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah dengan mendorong kreatifitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dan menciptakan daya saing kemandirian yang didasari semangat kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi dan masyarakat untuk mewujudkan Kukar lebih baik ke depan.

Sehingga dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke depan akan melaksanakan Program Dedikasi dengan sub kegiatan strategis dan prioritasnya berupa :

1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luasan di Bawah 10 (sepuluh) Ha;
2. Pembangunan Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat;
3. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Untilitas Umum Perumahan;

4. Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan.

b). Pencapaian SDGs,

Ketersediaan air dan sanitasi yang menjadi *goals* keenam dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga melandasi pencapaian indikator kinerja yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, meskipun standar yang digunakan belum sepenuhnya mengikuti standar yang ditetapkan oleh gugus tugas, yaitu proporsi rumah tangga dengan akses air minum (bukan air bersih); dan pengolahan limbah rumah tangga yang diolah sesuai dengan standar nasional.

c). Pengentasan Kemiskinan,

Dalam rangka mendukung program Dedikasi Kesejahteraan Sosial Idaman, , Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu OPD pendukung terlaksananya program tersebut melaksanakan kegitan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, yang mana kegiatan tersebut termasuk dalam salah satu indikator pengentasan kemiskinan.

d). Pencapaian SPM,

Sebagai OPD pengampu SPM urusan Pekerjaan Umum (rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi serta rumah tangga yang memiliki akses pengolahan limbah domestik) serta SPM urusan Perumahan Rakyat (penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat terdampak program pemerintah kabupaten/kota. Hal ini didukung dengan program :

1. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
2. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dan
3. Pengembangan perumahan.

e). Konvergensi Penanganan Stunting

Sebagai salah satu OPD pendukung dalam pelaksanaan konvergensi penanganan stunting sesuai dengan tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan kegiatan tersebut melalui program

Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.

Berangkat dari kondisi tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki konstribusi untuk mewujudkan SDM Kabupaten Kutai Kartanegara yang berdaya saing. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki tugas dan fungsi dalam penyediaan air bersih dan sanitasi Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berdampak langsung pada kesehatan fisik dan mental masyarakat dalam rangka mendukung perwujudan SDM Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkualitas dan memiliki daya saing.

b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain:

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 – 2026. Pada dasarnya Rencana Kerja tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat.

Dalam Tahun Anggaran 2025 Program Kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan Sasaran Strategis dan Tujuannya yaitu sebanyak 7 (Tujuh) Program, 18 (delapan belas Kegiatan, 68 (enam puluh delapan) Sub Kegiatan dengan Total Anggaran sebesar *Rp. 312.423.224.667,- (Tiga Ratus Dua Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua*

Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), yang sumber dananya berasal dari APBD. Adapun Tabel T.C 33 dan Program Kegiatan & Anggaran adalah sebagai berikut :

Program Kegiatan & Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN RKPD TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
1	ProgramPengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 91.513.234.158	Rp. 11.000.000.000,-
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 17.939.999.993	Rp. 6.000.000.000,-
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 39.275.982.684	Rp. 54.108.812.417,-
4	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 21.400.000.000	Rp. 7.536.384.560,-
5	Program Kawasan Permukiman	Rp. 5.613.615.440	Rp. 1.113.615.440,-
6	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 10.340.000.000	Rp. 10.340.000.000,-
7	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Rp. 126.340.392.392	Rp. 1.350.000.000,-
JUMLAH		*Rp. 312.423.224.667,-*	*Rp. 91.448.812.417,-*

TABEL TC.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten		93,58	Persen	91.513.234.158			1,48	Persen	11.000.000.000
		2. Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan		1,26	Persen				95	Persen	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan		4	Paket	91.513.234.158			4	Paket	11.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Kab. Kutai Kartanegara	0	Unit	-	APBD			
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun		1	Dokumen	1.200.000.000	APBD			
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Kab. Kutai Kartanegara	170	Liter/Detik	43.220.414.158	APBD	3	Liter/Detik	4.000.000.000
1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		20	Desa	350.000.000	APBD			
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	257,5	Liter/Detik	20.400.000.000	APBD	257,5	Liter/Detik	5.500.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7230	SR	25.842.820.000	APBD		1500	SR	1.500.000.000
1.03.03.2.01.0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi		2	Unit	500.000.000	APBD				
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		88,3	Persen	17.939.999.993			88,3	Persen	6.000.000.000
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah dengan akses Unit Pengolahan Setempat/Terpusat		51	Unit	17.939.999.993			51	Unit	6.000.000.000
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	M^3/Hari	-	APBD		1	M^3/Hari	700.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	M³/Hari	-	APBD		15	M³/Hari	1.484.947.500
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	Rumah Tangga	-	APBD		30	Rumah Tangga	168.750.000
1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	Penyelenggara	-	APBD		20	Penyelenggara	110.651.250
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	M³/Hari	-	APBD		100	M³/Hari	750.000.000
1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	Unit	-	APBD		1	unit	675.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	Unit	-	APBD		1	unit	1.500.000.000
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar		388	Rumah Tangga	16.868.697.493	APBD				
1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121	Orang	421.302.500	APBD		1	orang	310.651.250
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4	Dokumen	650.000.000	APBD		2	Dokumen	300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
01.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		72	Nilai	39.275.982.684			72	nilai	54.108.812.417
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9	Dokumen	1.100.000.000			9	Dokumen	225.000.000
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3	Dokumen	450.000.000	APBD		5	Dokumen	100.000.000
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3	Laporan	100.000.000	APBD		1	Dokumen	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	Laporan	150.000.000	APBD		3	Laporan	75.000.000
1.04.01.2.01.0008	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1	Dokumen	50.000.000,00	APBD				
1.04.01.2.01.0009	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		1	Data	250.000.000,00	APBD				
1.04.01.2.01.0010	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1	Berita Acara	100.000.000,00	APBD				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		4	Laporan	21.021.462.065			4	Laporan	20.901.952.728
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2400	Orang/bulan	20.571.462.065	APBD		2400	Orang/bulan	20.451.952.728
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Laporan	25.000.000	APBD		1	Laporan	50.000.000
1.04.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14	Dokumen	50.000.000	APBD		14	Dokumen	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	Laporan	350.000.000	APBD		12	Laporan	350.000.000
1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1	Dokumen	25.000.000	APBD				
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		1	Dokumen	105.000.000			1	Dokumen	50.000.000
1.04.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1	Dokumen	25.000.000	APBD				
1.04.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1	Laporan	50.000.000	APBD				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.04.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Laporan	30.000.000	APBD		1	Laporan	50.000.000
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		2	Dokumen	350.000.000			2	Dokumen	100.000.000
1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Dokumen	50.000.000	APBD		1	Dokumen	50.000.000
1.04.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Dokumen	50.000.000	APBD		1	Dokumen	50.000.000
1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		25	Orang	250.000.000	APBD				
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		7	Layanan	3.726.759.005			7	Layanan	1.206.759.005

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Paket	1.100.000.000	APBD		45	Paket	250.000.000
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Paket	200.000.000	APBD		2500	Paket	200.000.000
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Paket	500.000.000	APBD		151100	Paket	200.000.000
1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6334	Dokumen	75.000.000	APBD		6334	Dokumen	75.000.000
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65	Laporan	801.759.005	APBD		65	Laporan	301.759.005

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250	Dokumen	1.000.000.000	APBD		250	Dokumen	130.000.000
1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250	Dokumen	50.000.000	APBD		1	Dokumen	50.000.000
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah		10	Unit	1.000.000.000			10	Unit	100.000.000
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10	Unit	1.000.000.000	APBD		10	Unit	100.000.000
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12	Bulan	8.814.761.614			12	Bulan	29.425.100.684

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	Laporan	4.034.342.080	APBD		12	Laporan	934.342.080
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	Laporan	4.780.419.534	APBD		12	Laporan	28.490.758.604
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diperlihara		118	Unit	3.158.000.000			118	Unit	2.100.000.000
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45	Unit	1.900.000.000	APBD		45	Unit	500.000.000
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40	Unit	-	APBD		40	Unit	1.200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30	Unit	100.000.000	APBD		30	Unit	100.000.000
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	Unit	200.000.000	APBD		2	Unit	200.000.000
1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Unit	958.000.000	APBD		1	Unit	100.000.000
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1. Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana		100	Persen	21.400.000.000			100	Persen	7.536.384.560
		2. Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten		100	Persen				100	Persen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ Relokasi Program Kabupaten		15	Dokumen	1.250.000.000			14	Dokumen	1.250.000.000
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Kutai Kartanegara , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Dokumen	100.000.000	APBD		1	Dokumen	100.000.000
1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kab Kukar (Menunggu data dari BPBD)	4	Dokumen	250.000.000	APBD		4	Dokumen	250.000.000
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Kab Kukar (Menunggu data dari BPBD)	1	Dokumen	300.000.000	APBD		1	Dokumen	300.000.000
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Tabang dan Kenohan	1	Dokumen	100.000.000	APBD		1	Dokumen	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Desa Muai Kec. Kembang Janggut	2	Dokumen	100.000.000	APBD		2	Dokumen	100.000.000
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Kecamatan Kenohan dan Kecamatan Tabang*	6	Dokumen	400.000.000	APBD		6	Dokumen	400.000.000
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten		1	Kegiatan	100.000.000			1	Kegiatan	100.000.000
1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	*Desa Muai Kec. Kembang Janggut*	1	Orang	100.000.000	APBD		1	Orang	100.000.000
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang dibangun/direhab		19	Unit	19.850.000.000			33	Unit	6.186.384.560

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	*Kab Kukar (Menunggu data dari BPBD)*	5	Unit Rumah	200.000.000	APBD		5	Unit Rumah	200.000.000
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun					APBD		150		150.000.000
1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	*Tenggarong, Mangkurawang*	0	Unit Rumah	-	APBD		2	Unit Rumah	836.384.560
1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut*	30	Unit Rumah	19.650.000.000	APBD		28	Unit Rumah	5.000.000.000
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan perumahan	Jumlah Dokumen Perizinan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		1	Dokumen	200.000.000					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik		1	Dokumen	100.000.000	APBD			
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		1	Laporan	100.000.000	APBD			
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani		48,19	Persen	5.613.615.440			53,67	Persen	1.113.615.440
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh		1	Dokumen	500.000.000			1	Dokumen	500.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Dokumen	500.000.000	APBD		1	Dokumen	500.000.000
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Area		2	Hektar (Ha)	5.113.615.440			2	Hektar (Ha)	613.615.440
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	*Loa Kulu*	20	Unit Rumah	263.615.440	APBD		20	Unit Rumah	263.615.440
1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	*Loa Kulu*	2	Ha	4.850.000.000	APBD		2	Ha	350.000.000
01.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1. Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN		517	Unit	10.340.000.000			6,1	Unit	10.340.000.000
		2. Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		6,4	Persen				517	Persen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
01.04.04 .2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang direnovasi		517	Unit	10.340.000.000			517	Unit	10.340.000.000
01.04.04 .2.01. 0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Kab. Kutai Kartanegara , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	517	Unit Rumah	10.340.000.000	APBD		517	Unit Rumah	10.340.000.000
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik		4,29	Persen	126.340.392.392			4,11	Persen	1.350.000.000
01.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Perumahan yang Terfasilitasi PSU		15,75	Persen	126.340.392.392			19,68	Persen	1.350.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
01.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	Dokumen	1.400.000.000	APBD		2	Dokumen	500.000.000
01.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79	Lokasi	124.840.392.392	APBD		257	Lokasi	850.000.000
01.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang		1	Laporan	100.000.000	APBD				
Jumlah						312.423.224.667					91.448.812.417

BAB V
P E N U T U P

Renja Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

1. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian ini akan diakomodir pada saat dilakukan revieu terhadap Renstra.
2. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

1. Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan (DPA) tahun 2025
2. Seluruh unsur Aparatus sipil Negara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Berkewajiban untuk melaksanakan rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya.
3. Setiap unsur Aparatur Sipil di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana yang sudah ditetapkan dengan evaluasi secara berkala.

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk melakukan tugas perencanaan yang semakin komplek dengan diadakannya pelatihan, seminar serta kegiatan lain yang menunjang peningkatan kinerja.
2. Seluruh Aparatur di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.Kukar perlu meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam melaksanakan program,kegiatanyang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja tahun 2025 dengan efektif dan efisien.
3. Hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan Rencana Kerja menunjukkan perlunya perubahan dengan perpedoman pada ketentuan yang berlaku
4. Perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 ini untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

n.RENJA DINAS PERHUBUNGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan BAB I Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang dimaksud Renja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025.

Proses penyusunan Rancangan Renja Dinas Perhubungan tahun 2025 akan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Keterkaitan antara Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD-Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kementerian, dan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, yaitu: penyusunan dokumen Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025, kemudian dalam penyusunan Rancangan Renja tersebut harus terintegrasi dengan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025, serta memperhatikan Renja Kementerian Perhubungan dan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025. Selanjutnya dengan tersusunnya Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025, maka selanjutnya akan dilakukan proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

Dengan demikian Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Renja tahun 2025 ini dimaksudkan untuk merencanakan dan memberikan gambaran strategis arah rencana kerja Dinas Perhubungan yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun pada tahun 2025, dengan melanjutkan program kerja yang telah dilaksanakan. Selain itu juga sebagai panduan target dan kinerja pelaksanaan program pembangunan tahun 2025 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan usulan dari masyarakat yang menjadi skala prioritas dalam mewujudkan Pemerintahan *GOOD GOVERNANCE* dan Akuntabilitas Pelayanan Publik, yang sejalan dan sesuai kebutuhan. Kemudian penyusunan Rancangan Renja ini bertujuan untuk:

a. Memberikan arah pembangunan di sektor perhubungan di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian pada tahun 2025;
b. Menyiapkan tolak ukur, sehingga pengukuran kinerja dinas dapat dilakukan secara akuntabel dan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pertanggungjawabannya;
c. Membantu dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan dokumen Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 ini, secara garis besar susunan dan uraian pokok bahasan dalam penulisannya adalah terdiri dari bagian dan bab sebagai berikut:

BAGIAN AWAL	:	Halaman Judul (Cover Renja), Kata Pengantar, dan Daftar Isi.
BAB I	:	Bagian Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
BAB II	:	Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu yang terdiri dari: evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangakat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
BAB III	:	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang memuat: telaahan terhadap kebijakan Nasional, dan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.
BAB IV	:	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang menguraikan Program dan Kegiatan
BAB V	:	Bagian Penutup yang menguraikan tentang: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.
BAGIAN AKHIR	:	Memuat lampiran-lampiran yang diperlukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun 2023 (n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan 2024 (n1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang pada waktu penyusunan Renja Dinas Perhubungan baru berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Perhubungan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perhubungan dan atau realisasi APBD Dinas Perhubungan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; dan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya untuk rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan pencapaian Renstra Dinas Perhubungan s/d tahun 2024 (tahun berjalan) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2022			Target program & Kegiatan Renja th.2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2023)	
					Target Renja th.2022	Realisasi Renja th.2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
02:15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	NILAI IKM	79	100%	100%	100%	100%	100%	3	4%
2.15.01	Program Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP	83	93%	80	74,44	93%	100%	76	92%
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase	100	4%	100	4,0	4%	100	104	104%
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	5	4	80%	5	13	3
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	4	4	3	75%	4	11	4

2.14.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	5	5	5	100%	1	11	6

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2022			Target program & Kegiatan Renja th.2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2023)	
					Target Renja th.2022	Realisasi Renja th.2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	100%	100	100	100%	100	201	2
2.15.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	385	385	385	385	100%	385	1.155	3,0
2.15.01.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	3
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporann Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	12	12	12	12	100%	12	36	3
2.15.01.2.02.08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	1	1	1	100%	1	3	60%
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Prosentase	100	100	100	100	100%	100	300	3
2.15.01.2.03.02	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	3

2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase	0,5	4	100	4	4%	100	107	215
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	385	0	0	0	#DIV/0!	0	-	-

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2022			Target program & Kegiatan Renja th.2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2023)	
					Target Renja th.2022	Realisasi Renja th.2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	100%	1	1	100%	1	3	3
2.15.01.2.05.04	Kordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	0%	0%	0%	#DIV/0!	0%	-	#DIV/0!
2.15.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	100%	1	1	100%	1	3	3
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	20	20	20	100%	20	60	2
2.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	0	0	0	0	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!

2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	20	4	4	4	100%	4	12	1
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase	100	11%	100	11	11%	100%	12	0
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	7	7	7	100%	7	21	11

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2022			Target program & Kegiatan Renja th.2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2023)	
					Target Renja th.2022	Realisasi Renja th.2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	3	3	100%	3	9	3
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	15	15	15	100%	15	45	45
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	10	10	10	100%	10	30	15
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	40	40	40	100%	40	120	3
2.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	3

2.15.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	2	2	1	50%	2	5	5
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Prosentase	100%	0%	100%	0	0%	100%	1	1
2.15.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	0	0	0	#DIV/0!	0	-	-
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	0	0	0	#DIV/0!	0	-	-

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2022			Target program & Kegiatan Renja th.2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2023)	
					Target Renja th.2022	Realisasi Renja th.2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase	100	121,5	100	121,5	122%	100	343	3
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	5	5	5	100%	5	15	3
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	238	238	238	238	100%	238	714	3

2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase	100	10%	100	9,67	10%	100	110	1
2.15.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23	15	15	15	100%	15	45	2
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31	17	17	17	100%	17	2	0
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	167	20	20	20	100%	20	60	0
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	3	2	2	2	100%	2	6	2

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2022			Target program & Kegiatan Renja th.2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2023)	
					Target Renja th.2022	Realisasi Renja th.2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	1	1	1	1	100%	1	3	3

2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	1	7	3	3	100%	3	13	13
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Prosentase	32,41	19713%	30	217,79	726%	100	515	16
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase	100	6875%	100%	6875%	6875%	100%	139	1
2.15.02.2.02.01	Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Perencanaan ATCS)	31968	150	150	150	100%	150	450	0
2.15.02.2.02.02	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	250	0	1	0	0%	0	1	0
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1456	120	120	120	100%	120	360	0
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	261	5	5	5	100%	5	15	0

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2022			Target program & Kegiatan Renja th.2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2023)	
					Target Renja th.2022	Realisasi Renja th.2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Prosentase	100	3%	100	2,5	3%	100	103	1

2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	0	1	8	8	100%	8	17	#DIV/0!
2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	0	0	0	0	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	0	0	0	0	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2	2	2	2	100%	2	6	3
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Prosentase	100	4%	100	3,5	4%	100	104	1
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten /kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	0	0	0	#DIV/0!	0	-	-

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2022			Target program & Kegiatan Renja th.2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2023)	
					Target Renja th.2022	Realisasi Renja th.2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)

2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggeraaan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	5	15	15	7	47%	15	37	7
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase	100	170360%	100%	170360%	170360%	100%	3.408	34
2.15.02.2.05.01	Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	12	4	4	4	100%	4	12	1
2.15.02.2.05.02	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8	4	4	4	100%	4	12	2
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	0	8	8	8	100%	8	24	#DIV/0!
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	13.400	17000	17000	17000	100%	17000	51.000	4
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8	0	0	0	#DIV/0!	0	-	-

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2022			Target program & Kegiatan Renja th.2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2023)	
					Target Renja th.2022	Realisasi Renja th.2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji.	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	0	0	1	0	0%	1	1	#DIV/0!
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	28	20	20	20	100%	20	60	2
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	0	0	0	0%	0	-	-
2.15.02.2.05.09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PKB	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0%	0	-	#DIV/0!
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase	100	180%	100	179,75	180%	100	282	3
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5	15	15	13	87%	15	43	9

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2022			Target program & Kegiatan Renja th.2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2023)	
					Target Renja th.2022	Realisasi Renja th.2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	90	702	702	702	100%	702	2.106	23
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	6	10	10	3	30%	10	23	4
2.15.02.2.06.05	Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	3	3	1	33%	3	7	7
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase	10	0%	10	0	0%	10	10	1
2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	0	0	0	0	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!
2.15.02.2.07.02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	0	0	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1	0	0	0	#DIV/0!	0	-	-

2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase	20	0%	20	0	0%	20	20	1

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2022			Target program & Kegiatan Renja th.2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2023)	
					Target Renja th.2022	Realisasi Renja th.2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.02.2.08.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	0	0	0%	0	-	#DIV/0!
2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1	0	0	0	0%	1	1	1
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1	0	4,5	0	0%	4,5	5	5
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0%	1	1	1
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1	0	0	0	0%	1	1	1
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) daerah Kabupeten/Kota	Prosentase	100%	0%	0	0	0%	1	1	1

2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	0	0	0	0%	1	1	#VALUE!

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2022			Target program & Kegiatan Renja th.2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2023)	
					Target Renja th.2022	Realisasi Renja th.2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalamTrayek Lintas Daerah kabupaten / Kota	Prosentase	100	0%	100	2	0%	100	102	1
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	2	2	100%	2	6	3
02:15:03	Program Penglolaan Pelayaran	Prosentase	52	21%	1	2,6	260%	100	103	2

2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase	100	5%	100	5	5%	100	105	1
2.15.03.2.01.02	Koordinasi dan singkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	6	5	5	5	100%	100	110	18

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2022			Target program & Kegiatan Renja th.2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2023)	
					Target Renja th.2022	Realisasi Renja th.2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal		100	0%	100	0	0%	100	100	1
2.15.03.2.10.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal\	-	0	0	0	#DIV/0!	0	-	#VALUE!

2.15.03.2.11	Penetapan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Prosentase	100	1%	100	1	1%	100	101	1
2.15.03.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai Dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	2		1	1	100%	0	1	1
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian pelabuhan Pengumpan Lokal	Prosentase	25	0%	100	0	0%	100	100	4
2.15.03.2.12.02	Pembangunan pelabuhan pengumpan lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	0	1	1	1	100%	0	2	#DIV/0!

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2022			Target program & Kegiatan Renja th.2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2023)	
					Target Renja th.2022	Realisasi Renja th.2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	0	0	0	0	0%	0	-	#DIV/0!
2.15.03.2.12.04	Pengawasan pengoperasian pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan	10	0	0	0	0%	0	-	-

		Lokal								
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Prosentase	100	100%	100	6,7	100%	100	108	1
2.15.03.2.13.02	Pembangunan pelabuhan sungai dan danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	2	1	2	2	100%	1	4	2
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	2	7	7	2	29%	100%	10	5
2.15.03.2.13.04	Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	10	18	18	16	89%	100	134	13

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK , maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pada pembahasan sub bab ini akan disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, sebagai berikut:

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Prosentase Ketersediaan Sarana, Prasarana Serta Fasilitas LLAJ			30,41	32,41	34,41	36,41	38,41	30,41		34,41	36,41	38,41	
2	Cakupan Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			100	100	100	100	100	100		100	100	100	
3	Jumlah Dokumen			-	-	-	-	-	-		-	-	-	
4	Prosentase Ketersediaan Prasarana Dan Perlengkapan Jalan			100	100	100	100	100	100		100	100	100	
5	Jumlah Prasarana jalan yang dibangun			32116	31967	32028	31913	31912	1001		32028	31913	31912	
6	-Jumlah Rambu Lalu Lintas			879	879	879	879	879	200		879	879	879	
7	-Panjang Marka Jalan			19760	19760	19760	19760	19760	800		19760	19760	19760	
8	-Jumlah Paku Jalan/Marka			10032	10032	10032	10032	10032	0		10032	10032	10032	
9	-Jumlah Guadril			1240	1240	1240	1240	1240	0		1240	1240	1240	
10	-Jumlah Deliniator			-	-	-	-	-	-		-	-	-	
11	-Jumlah Traffic Cone			200	50	50	-	-	-		50	-	-	

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

12	-Jumalh Traffic Light			1	1	-	-	-	-		-	-	-	
13	-jumlah Road Baririer			-	-	-	-	-	-		-	-	-	
14	-jumlah Cermin Cembung			-	-	-	-	-	-		-	-	-	
15	-Jumlah Papan nama jalan			-	-	-	-	-	-		-	-	-	
16	-Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)			-	-	-	-	-	-		-	-	-	
17	-Panjang ZOOSS			-	1	-	1	-	-		-	1	-	
18	-Jumlah Warning Light			2	2	2	-	-	-		2	-	-	
19	-Jumlah ATCS			1	0	-	-	-	-		-	-	-	
20	-Jumlah Pelican Cross			0	1	-	-	-	-		-	-	-	
21	-Jumlah lahan parkir			1	1	1	1	1	1		1	1	1	
22	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang disediakan			250	250	250	250	250	250		250	250	250	
23	-Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)			250	250	250	250	250	120		250	250	250	
24	-Jumlah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)			-	-	-	-	-	-		-	-	-	
25	-Jumlah Halte			-	-	-	-	-	-		-	-	-	
26	Jumlah Prasarana jalan yang direhabilitasi dan dipelihara			1456	1456	1456	1456	1456	1506		1456	1456	1456	
27	-Jumlah Rambu Lalu Lintas			150	150	150	150	150	200		150	150	150	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Beberapa permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebagai berikut:

1) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Program Penyelenggaraan LLAJ)
   a) Belum Adanya Regulasi Berupa Surat Keputusan Bupati Tentang Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan Yang Mencakup Seluruh Wilayah Kecamatan di Kab. Kukar;
   b) Belum Terlayaninya Beberapa Wilayah Kecamatan Dengan Angkutan Penumpang Umum Trayek Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) Perintis;
   c) Belum Terpenuhinya Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Tertentu Didalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Rambu lalin, Traffig Ligth, Marka jalan, Papan Nama Jalan, LPJU, JPO, Halte;
   d) Belum Optimalnya Pelaksanaan Manajemen Rekaya Lalu Lintas di Kabupaten Kutai Kartanegara;
   e) Belum adanya Terminal Penumpang Tipe C di Beberapa Kecamatan;
   f) Belum Adanaya Terminal Khusus Angkutan Barang dikota Tenggarong Maupun di Kecamatan;
   g) Belum Optimalnya Pengeloaan dan Penyelenggraan Perparkiran di Kab. Kukar;
   h) Penyelengaraan dan Pengelolaan Perparkiran di Kabupaten Kukar Selama Ini diLakukan Oleh Beberapa OPD sehingga Menyulitkan Dishub untuk Melakukan Pembinaan, Pengembangan serta Menyusun Arah Dan Kebijakan Perparkiran;
   i) Belum tersedianya Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kecamatan;
2) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Program Pengelolaan Pelayaran)
   a) Belum Disusun Dan Ditetapkannya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan pada tabel berikut:

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan pada tabel berikut:

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

Rancangan Awal RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting
Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02:15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		SURVEY INDEX KEPUASAN MASYRAKAT	NILAI IKM	80	37.856.326.672,00	APBD	02:15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		SURVEY INDEX KEPUASAN MASYRAKAT	NILAI IKM	80	37.856.326.672,00	APBD	
			Prosentase Ketersediaan Prasarana Jalan	Prosentase	31,24						Prosentase Ketersediaan Prasarana Jalan	Prosentase	31,24			
			Prosentase Ketersedian Perlengkap Jalan	Prosentase	3,17						Prosentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Prosentase	3,17			
			Prosentase Ketersediaan sarana dan prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal	Prosentase	27						Prosentase Ketersediaan sarana dan prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal	Prosentase	27			
			Prosentase Ketersediaan sarana dan prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Prosentase	25						Prosentase Ketersediaan sarana dan prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Prosentase	25			

2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kab Kukar	Prosentase Ketersediaan Sarana, Prasarana Serta Fasilitas LLAJ	Prosentase	32,41	3.851.810.484,00		2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kab Kukar	Prosentase Ketersediaan Sarana, Prasarana Serta Fasilitas LLAJ	Prosentase	32,41	3.851.810.484,00	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Prosentase Ketersediaan Prasarana Dan Perlengkapan Jalan	Prosentase	100	1.100.000.000,00	APBD	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Prosentase Ketersediaan Prasarana Dan Perlengkapan Jalan	Prosentase	100	Rp 1.100.000.000,00	APBD
2.15.02.2.02.01	Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten / Kota	Kab Kukar	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	31967 Unit dan 1 unit	200.000.000,00	APBD	2.15.02.2.02.01	Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten / Kota	Kab Kukar	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	31967 Unit dan 1 unit	200.000.000,00	APBD
2.15.02.2.02.02	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten / Kota	Kab Kukar	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	250 Unit	500.000.000,00	APBD	2.15.02.2.02.02	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten / Kota	Kab Kukar	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	250 Unit	500.000.000,00	APBD
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Kab Kukar	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1456 Unit	200.000.000,00	APBD	2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Kab Kukar	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1456 Unit	200.000.000,00	APBD
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab Kukar	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	261 Unit	200.000.000,00	APBD	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab Kukar	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	261 Unit	200.000.000,00	APBD

Rancangan Awal RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Pentin
Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	

			Kegiatan		Kinerja						Kegiatan		Kinerja			g
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Prosentase Peningkatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C/ IKM	Prosentase	100	150.000.000,00	APBD	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Prosentase Peningkatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C/ IKM	Prosentase	100	150.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terminal Tangga Arung dan kota bangun	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	150.000.000,00	APBD	2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terminal Tangga Arung dan kota bangun	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	150.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Prosentase Peningkatan Pengeloaan Perparkiran	Prosentase	100	300.000.000,00	APBD	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Prosentase Peningkatan Pengeloaan Perparkiran	Prosentase	100	250.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten /kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan	Dokumen	1	100.000.000,00	APBD	2.15.02.2.04.01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten /kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan	Dokumen	1	100.000.000,00	APBD	

	secara elektronik		Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggeraaan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	5	200.000.000,00	APBD	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggeraaan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	5	200.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Prosentase Kepemilikan Buku Uji Angkutan Umum	Prosentase	100	800.000.000,00	APBD	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Prosentase Kepemilikan Buku Uji Angkutan Umum	Prosentase	100	800.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	0	50.000.000,00	APBD	2.15.02.2.05.01	Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	0	50.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.05.02	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala	Kab Kukar	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan	Orang	0	50.000.000,00	APBD	2.15.02.2.05.02	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Kukar	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan	Orang	0	50.000.000,00	APBD	

	Kendaraan Bermotor		Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya								Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya					

Rancangan Awal RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting
Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Kukar	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	0	50.000.000,00	APBD	2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Kukar	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	0	50.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	13.400	300.000.000,00	APBD	2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	13.400	300.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	28 Unit	300.000.000,00	APBD	2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	28 Unit	300.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Kukar	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian	Laporan	1	50.000.000,00	APBD	2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Kukar	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian	Laporan	1	50.000.000,00	APBD	

			Berkala Kendaraan Bermotor								Berkala Kendaraan Bermotor				
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Prosentase	100	1.200.000.000,00	APBD	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Prosentase	100	1.200.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Laporan	6	300.000.000,00	APBD	2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Laporan	6	300.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Kab Kukar				100,000,000.00								100,000,000.00	APBD	
2.15.02.2.06.05	Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	1	200.000.000,00	APBD	2.15.02.2.06.05	Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	1	200.000.000,00	APBD	

2.15.02.2.06.02	Pengadaan, pemasangan, perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Kab Kukar	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit	90 uit	400.000.000,00	APBD	2.15.02.2.06.02	Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Kab Kukar	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit	90 uit	400.000.000,00	APBD	

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini berguna untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan di sektor perhubungan guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 dan seterusnya. sehingga pengukuran kinerja dapat dilakukan secara akuntabel dan memudahkan dalam melakukan evaluasi serta pertanggungjawaban. Disamping itu Rancangan Rencana Kerja tahun 2025 dapat membantu dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024, ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, antara lain sebagai berikut:

1. Perlunya dilakukan percepatan dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, yang harus sesegera mungkin dilaksanakan pada awal tahun anggaran atau setelah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) ditetapkan;
2. Apabila ketersediaan anggaran pada tahun anggaran 2025 tidak sesuai dengan kebutuhan, maka penentuan program dan kegiatan yang akan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 harus berdasarkan skala prioritas.

Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dalam rangka pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas bersama Sekretaris, seluruh Kepala Bidang, seluruh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, serta Kepala UPT di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara secara bersama–sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan tahun 2025 dengan sebaik–baiknya, serta berkewajiban menjaga konsistensi antara Renja dengan Renstra;
2. Dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun 2025, masing–masing Bidang, Sub Bagian dan Seksi, serta UPT di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara harus melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Renja tahun 2024 dan tahun berjalan Renja 2024;

3. Penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 harus berdasarkan skala prioritas;
4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dan tugas-tugas lainnya, seluruh Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah ditetapkannya dokumen Rancangan Rencana Kerja ini, maka untuk pelaksanaannya diperlukan kerjasama yang baik dari semua pemangku kepentingan sampai pada ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 2025 hingga terlaksananya seluruh program dan kegiatan sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025.

Demikian penyusunan dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 ini dibuat, untuk menjadi perhatian sebagaimana mestinya.

m.RENJA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis Lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang, yaitu yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah untuk mendukung capaian visi dan misi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026. Rencana dan strategi untuk mendukung capaian visi dan misi kepala daerah tersebut disusun dalam dokumen Renja Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan untuk mencapai target kinerja utama kepala daerah.

Renja Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun untuk menjabarkan prioritas dan target kinerja serta menjadi pedoman pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;

16. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan Dan Penataan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 63);
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dilingkup Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Tujuan dari penyusunan renja ini adalah untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara mengaju kepada Permendagri 86 Tahun 2017, dengan pokok bahasan Serta susunan garis besar penulisan renja ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Program Dan Kegiatan
BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan capaian Renstra. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) urusan Pertanahan dan urusan penataan ruang Tahun 2023 Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, melaksanakan 10 (Sepuluh) Program dan 22 (Dua Puluh Satu) Kegiatan dan 53 (Lima Puluh Tiga) Sub Kegiatan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra urusan Pertanahan dan Penataan Ruang berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Urusan Pertanahan dan Penataan Ruang tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini adalah realisasi keuangan program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2023, disampaikan realisasi capaian kinerja dari Sepuluh (10) program yang dilaksanakan pada tahun 2023, hasil capaian terendah yaitu dari Program Program Pengelolaan Izin Lokasi. Sedangkan untuk capain yang tinggi tersebar di beberapa program dan kegiatan. Adapun penjelasan program kegiatan berdasarkan memenuhi target atau tidaknya, dijelaskan pada uraian di bawah ini :

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan beberapa program/kegiatan yang tidak memenuhi target yaitu :

a. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.

Program ini terdiri dari terdiri dari Satu (1) kegiatan dan 1 (Satu) Sub Kegiatan, Sub Kegiatan tidak memenuhi target dari target 9 pengadaan tanah yang dilaksanakan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tercapai 7 lokasi yang berhasil dilaksanakan sedangkan 2 lokasi tidak tercapai disebabkan adanya kendala yang mempengaruhi capaian indikator yaitu harga yang tidak sesuai dengan keinginan yang bersangkutan ditambah masalah data dukung administrasi kependudukan ahli waris yang kurang dan memerlukan proses persidangan serta administrasi hibah dan waris yang tidak dapat dibuktikan sehingga hanya dapat terealisasi 77,78 % yaitu dengan anggaran sebesar Rp13.317.050.756.00 dari total pagu Rp34,731,000,000.00

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Delapan (8) kegiatan dan 17 (Tujuh Belas) Sub Kegiatan, dan semua Sub kegiatan dapat memenuhi target capaian dengan anggaran Rp12.594.409.917 terserap 73% yaitu Rp11.712.408.036.

b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Pada program ini dijalankan dengan Dua (2) sub kegiatan kegiatan. kegiatan yang dilaksanakan dapat memenuhi target capaian 100%, karena dari sengketa tanah yang dilaporkan semua dapat difasilitasi dan diselesaikan dengan baik. hal ini menggambarkan bahwa kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebagai Fasilitator dalam penyelesaian Kasus/Sengketa tanah Negara sudah berjalan dengan baik. dengan anggaran terealisasi 99.63 % yaitu sebesar Rp323.185.007.00 dari total pagu Rp400.000.000.00

c. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Pada program ini terealisasi 59.32 % yaitu

dengan anggaran sebesar Rp400.411.174.00 dari total pagu Rp675.000.000.00

d. Program Penatagunaan Tanah

Pada program ini dilaksanakan dengan satu (1) kegiatan dan 3 (Tiga) sub kegiatan yang dilaksanakan dengan capaian terealisasi 86.82 % dengan realisasi Rp380.264.010.00 dari total pagu anggaran sebesar Rp. Rp438.000.000.00

e. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

Pada Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah ini dijalankan dengan Satu kegiatan dengan Satu Sub Kegiatan yang dilaksanakan dan dapat memenuhi target capaian dan terealisasi 74,62% dengan anggaran terealisasi Rp298.487715.00 dari total pagu Rp.400,000,000.00

f. Program Pengelolaan Izin Lokasi

Pada Program Pengelolaan Izin Lokasi Tanah ini dijalankan dengan Satu kegiatan dengan Satu Sub Kegiatan yang dilaksanakan dan dapat memenuhi target dan terealisasi 92,46% dengan anggaran terealisasi Rp161,801,500.00 dari total pagu Rp175,000,000.00

g. Program Penetapan Tanah Ulayat, Pada Program Penetapan Tanah Ulayat Tanah ini dijalankan dengan Satu kegiatan dengan Satu Sub Kegiatan yang dilaksanakan dan dapat memenuhi target capaian 15%, terealisasi 96,30% dengan anggaran terealisasi Rp96.300.000.0 dari total pagu Rp 100.000.000.00

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang ini dijalankan dengan Empat (4) kegiatan dan 9 (Sembilan) Sub Kegiatan, walaupun terdapat perubahan pedoman RDTR sehingga harus melakukan pembaharuan pedoman RDTR dari sebelumnya namun semua kegiatan yang dilaksanakan dapat memenuhi target capaian 100%, dengan anggaran Rp4.946.570.500 terserap 91.20% yaitu Rp2.301.297.655,00

b. Program Pengelolaan Tanah Kosong, Pada Program Pengelolaan Tanah Kosong ini dijalankan dengan Dua (2) kegiatan dengan Tiga (3) Sub Kegiatan yang dilaksanakan dan dapat memenuhi target capaian 94,06%, dengan anggaran terealisasi Rp1.035.144.658.00 dari total pagu Rp1.100.548.464.00.

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapaianya, Terpenuhinya, Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan;

Adapun beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kesalahan dalam Penganggaran RKA/DPA dan kode rekening pada system SIPD
2. Kurangnya koordinasi untuk beberapa kegiatan yang tidak terealisasi sesuai dengan target.
3. Efisiensi anggaran

Adapun tercapianya target kinerja ditunjang oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Penyusunan target Rencana kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas;
2. Ketersediaan dana yang sesuai dengan anggaran kas
3. Waktu dan pelaksanaan kegiatan yang mencukupi sesuai dengan *time schedule*;
4. Kualitas dan komitmen sumber daya manusia untuk pencapaian target Program/kegiatan;
5. Motivasi, arahan dan bimbingan dari pimpinan serta pengambilan keputusan yang dilakukan Pimpinan sehingga membantu optimalisasi kinerja;
6. Pekerjaan yang dilakukan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan

2.1.5 Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

1. Dengan tercapaianya target capaian program Renstra maka peningkatan sertifikasi aset Pemerintah Daerah telah ditarget setiap tahunnya untuk mengalami peningkatan;
2. Kegiatan pembinaan administrasi pertanahan di desa/kabupaten dapat dilaksanakan sesuai dengan taget, harapannya dengan peningkatan tertib administrasi sesuai dengan Perbub No 36 Tahun 2013

3. Penyelesaian Sengketa pertanahan memperkecil rasio sengketa pertanahan yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Tersusunnya dokumen RDTR Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

1. Melakukan validasi data untuk meningkatkan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan;
2. Koordinasi intensif dengan stakeholder terkait seperti pihak Kementerian ATR/BPN dan pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang dengan melibatkan pihak desa dan masyarakat umum.
4. Adanya usaha untuk menemukan model dan pendekatan dalam Koordinasi,monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas OPD yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat serta dinamika sistem pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel TC.29 sebagaimana terlampir :

TabelT-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SD TAHUN 2023

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/ kegiatan (output)	Target Kinerja (Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01. 03. 12	PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	85	65	70	70	96,99	75	210	2,47
01. 03. 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Indeks Perencanaan Tata Ruang	100	10	9	9	100	11	30	0,30

01. 03. 12 2.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1	1	-	-	100	-	1	1,00
01. 03. 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	6	6	1	1	100	-	7	1,17
01. 03. 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	2	-	4	4	100	-	4	2,00
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2	-	-	-	-	1	1	0,50
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	2	-	-	-	-	1	1	0,50

1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	2	-	-	-	-	4	4	2,00
01. 03. 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelaksanaan Tata Ruang	25	16,77			-	15	31,77	1,27
01. 03. 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	3	1	1	1	100	1	3	1,00
01. 03. 12 2.02 03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1	-	1	1	0	1	2	2,00
01. 03. 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pemanfaatan Tata Ruang	25	4,89			-	5	9,89	0,40
01. 03. 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	20	1	20	20	100	-	21	1,05

01. 03. 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	100	1	1	1	100	-	2	0,02
1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1	-	-	-	-	1	1	1,00
1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1	-	-	-	-	1	1	1,00
01. 03. 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pengendalian Tata Ruang	25	6,87			-	3,8	10,67	0,43
01. 03. 12 2.04 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1	1	1	1	100	-	2	2,00

01. 03. 12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1	1	1	1	100	-	2	2,00
01. 03. 12 2.04 03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	100	20	20	20	100	10	50	0,50
01. 03. 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	1	1	1	100	1	3	3,00
1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RT	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	40	-	-	-	-	20	20	0,50
1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	2	-	-	-	-	1	1	0,50
2 10 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78	74	75	75	100	76	225	2,88

2 10 01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	75	15	7	7	100	5	27	0,36
2 10 01. 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45	5	5	5	100	3	13	0,29
2 10 01. 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	25	5	2	2	100	2	9	0,36
2 10 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang akuntabel	60	2	2	2	100	2	6	0,10
2 10 01. 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	372	76	74		100	76	152	0,41
2 10 01. 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	10	2	2		100	2	4	0,40

2 10 01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) Pada Perangkat Daerah	5	2	2	2	100	2	6	1,20
2 10 01. 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	2	2	2	100	2	6	1,20
2 10 01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2	1	1	1	100	1	3	1,50
2 10 01. 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data administrasi kepegawaian	5	5	-	-	100	1	6	1,20
2.10.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	156	-	2	2	100	1	3	0,02
2.10.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90	-	30	30	100	30	60	0,67

2 10 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35	7	7	7	100	7	21	0,60
2 10 01. 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	45	1	1	1	100	1	3	0,07
2 10 01. 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	100	1	3	0,60
2 10 01. 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	100	1	3	0,60
2 10 01. 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	1	1	1	100	1	3	0,60
2 10 01. 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	-	1	1	100	1	2	0,50

2.10.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	-	1	1	100	-	1	0,25
2 10 01. 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	78	1	1	100	3	82	1,09
2 10 01. 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	1	1	1	100	1	3	0,60
2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit	100	15	51	51	100	20	86	0,86
2.10.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	-	1	1	100	-	1	0,20
2.10.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit	50	15	50	50	100	20	85	1,70

2 10 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60	12	12	12	100	12	36	0,60
2 10 01. 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	25	5	5	5	100	5	15	0,60
2 10 01. 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10	2	2	2	100	2	6	0,60
2 10 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	61	13	16	16	100	18	47	0,77
2 10 01. 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30	6	11	11	100	11	28	0,93

2 10 01. 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	6	4	4	100	6	16	0,53
2 10 01. 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	1	2	2	100	1	4	0,80
2.10.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	5,00	-	1	1	100	-	1	0,20
2 10 02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi	75	15	30	30	100	-	45	0,60

2 10 02 2.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pemberian izin Lokasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	1	1	1	100	-	2	0,40
2 10 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha	5	1	1	1	100	-	2	0,40
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melaui mediasi	100	80	80	80	100	90	250	2,50
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penyelesaian sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	114	22	23	23	100	90	135	1,18

2 10 04 2.01 01	Inventarisasi sengketa,konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10	2	2	2	100	2	6	0,60
2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	104	20	21	21	100	2	43	0,41
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	90	70	75	58,3	77,78	80	208,338	2,31
2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26	6	9	7	77,78	3	16	0,62

2 10 05 2.01 01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1	1	-	-	100	-	1	1,00
2 10 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20	-	9	7	-	3	10	0,50
2 10 06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan	100	83	86	86	100	90	259	2,59
2 10 06 2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penetapan Subjek dan objek Rdistribusi Tanh Serta Ganti kerugian Tanah kebelbihan maksimum	18	2	4	4	100	3	9	0,50

2 10 06 2.01 01	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5	-	1	1	100	1	2	0,40
2 10 06 2.01 02	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4	1	1	1	100	-	2	0,50
2 10 06 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	5	1	1	1	100	1	3	0,60
3 10 06 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4	-	1	1	100	1	2	0,50

2 10 06 2.02	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9	1	2	2	100	1	4	0,44
2 10 06 2.02 01	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	1	1	1	100	1	3	0,60
3 10 06 2.02 02	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	-	1	1	-	-	1	0,25

2 10 07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase tersedianya Penetapan Tanah Ulayat	75	15	30	30	100	45	90	1,20
2 10 07 2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupten/Kota	Jumlah laporan hasil penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota	12	1	1	1	100	2	4	0,33
2 10 07 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	1	1	1	100	1	3	0,60
3 10 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	-	-	-	-	-	0	0,00

02.10.07.2.01.0003	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Jumlah laporan hasil kegiatan Penetapan tanah ulayat	3	-	-	-	-	1	1	0,33
2 10 08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tanah Aset Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	75	55	60	60	100	65	180	2,40
2 10 08 2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah laporan hasil Penyelesaian masalah Tanah Kosong	5	1	1	1	100	1	3	0,60
2 10 08 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	5	1	1	1	100	1	3	0,60
2 10 08 2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	9	2	2	2	100	2	6	0,67
2 10 08 2.02 01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	4	1	1	1	100	1	3	0,75
2 10 08 2.02 02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	5	1	1	1	100	1	3	0,60

2 10 09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	86	82	83	83	100	84	249	2,90
2 10 09 2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah laporan penerbitan Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT	9	1	2	2	100	2	5	0,56
2 10 09 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	5	1	1	1	100	1	3	0,60
3 10 09 2.01 02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	4	-	1	1	100	1	2	0,50
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tersedianya Penetaangunaan Tanah	80	76	77	77	100	78	231	2,89
2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	7	3	3	3	100	4	10	1,43

2 10 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5	1	1	1	100	1	3	0,60
3 10 10 2.01 02	Koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	4	-	1	1	-	1	2	0,50
4 10 10 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	2	-	1	1	-	1	2	1,00
02.10.10.2.01.0004	Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul	Keluaran Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul	2	-	-	-	-	1	1	0,5

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 .Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yaitu:

TABEL TC.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PERHITUNGAN / RUMUSAN	TARGET RENSTRA -PD					REALISASI		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani / Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan *100%	80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	-
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum / Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum * 100%	70%	75%	80%	85%	90%	70%	60%	80%	85%	-

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PERHITUNGAN / RUMUSAN	TARGET RENSTRA -PD					REALISASI		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
3	Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan ke Masyarakat	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha / Jumlah penerima tanah obyek landreform *100 %	83%	86%	90%	95%	100%	83%	86%	90%	95%	-
4	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah / Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan * 100%	82%	83%	84%	85%	86%	82%	83%	84%	85%	-
5	Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat	Jumlah Bidang Tanah Aset Pemda yang Bersertifikat / Jumlah Bidang Tanah Aset Pemdase yang akan di disertifikatkan*100 %	55%	60%	65%	70%	75%	55%	68%	65%	70%	-

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PERHITUNGAN / RUMUSAN	TARGET RENSTRA -PD					REALISASI		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
6	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Persentase Luas Kab. Kutai Kartanegara (%) - Persentase Indikasi Ketidak Sesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	65%	70%	75%	80%	85%	65%	96,99%	75%	80%	-

Tabel Sasaran : Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria
1	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan	Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melaui mediasi	85%	85%	100%	Tinggi

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, tahun 2023 target sebesar 85% dan realisasinya 85% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai dengan kategori sangat tinggi karena dari sengketa tanah yang dilaporkan semua dapat difasilitasi dan diselesaikan dengan baik. hal ini menggambarkan bahwa kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebagai Fasilitator dalam penyelesaian Kasus/Sengketa tanah Negara sudah berjalan dengan baik. Namun walaupun target tercapai masih ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Kurang maksimalnya data dukung kasus permasalahan pertanahan dari unsur Desa, Kelurahan dan Kecamatan.

Solusi :

Tabel Sasaran : Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria
1	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan	Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan ke Masyarakat	86%	86%	100%	Tinggi

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, tahun 2023 target sebesar 86% dan realisasinya 86% atau capaian kinerja sebesar 100 %. Target kinerja tercapai dengan kategori tinggi terealisasinya penerima tanah obyek landreform sebesar 65 bidang di desa Jonggon jaya Kecamatan Loa Kulu kabupaten Kutai Kartanegara. Upaya yang dilakukan yaitu penguatan peran optimalisasi koordinasi dan kolaborasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan penataan reforma agraria dengan instansi vertikal dan stakeholder sebagai mitra pelaksanaan kegiatan.

Tabel Sasaran : Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria
1	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	83%	83%	100%	Tinggi

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, tahun 2023 target sebesar 83% dan terrealisasinya 83% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai dengan kategori sangat tinggi. Walaupun masuk kategori tinggi namun masih banyak faktor kendala dari indikator pada tahun 2023 yaitu masih tidak tertibnya administrasi pertanahan ditingkat Desa/kelurahan dan beberapa kecamatan yang tidak melengkapi beberapa informasi yang diperlukan seperti penggunaan tanah dan asal usul tanah. Upaya untuk mengatasi permasalahan yang telah dilaksanakan adalah memberikan pemahaman lebih lanjut kepada Kecamatan terkait pemenuhan data yang diperlukan.

tabel Sasaran : Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan pengendalian Pertanahan

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria
1	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	75%	60%	80%	Sedang

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, tahun 2023 target sebesar 75% dan realisasinya 60% atau capaian kinerja sebesar 80%. Target kinerja tercapai dengan kategori sedang karena indikator pada tahun 2023 dapat menyelesaikan 7 lokasi pengadaan tanah untuk fasilitas umum dari 9 lokasi yang ditargetkan . Banyak faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator kinerja pada tahun 2023 yaitu masih ada beberapa kecamatan yang ZNT nya belum ditetapkan serta proses Sering terjadi ketidak sepakatan oleh pemilik tanah terhadap penetapan harga dari KJPP. Upaya untuk mengatasi permasalahan yang telah dilaksanakan adalah memberikan pemahaman lebih lanjut kepada istansi yang memerlukan tanah dan pihak lain terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk fasilitas umum agar dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.

Tabel Sasaran : Meningkatnya Penatausahaan, Pemanfaatan dan pengendalian Pertanahan

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria
2	Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan	Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat	60%	68%	113%	Sangat Tinggi

- Target kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 sebesar 60% dan realisasinya 68% atau capaian kinerja sebesar 113 %. Walaupun masuk kategori Target kinerja tercapai dengan kategori sangat tinggi namun banyak faktor kendala dari indikator ini yaitu ;
- Alas hak yang tidak lengkap (Banyak surat Asli yang tidak ditemukan)
- Dokumen berupa foto copian sedangkan aslinya tidak ditemukansehingga harus membuat surat kehilangan dari kepolisian. (dalamprosesnya membutuhkan waktu yang lama)
- Penguasaan oleh Masyarakat karena batas tidak jelas dan penanganan

Solusi terhadap kendala diatas yaitu melaksanakan koordinasi dengan ATR/BPN sebagai instansi yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertipikat hak pakai atas tanah aset pemerintah.

Tabel Sasaran : Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria
3	Meningkatnya Pembangunan dan Pemanfaatan sesuai Arahan Pola Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	70	96.99	138%	Sangat Tinggi

Target kinerja Meningkatnya Pembangunan dan Pemanfaatan sesuai Arahan Pola Ruang tahun 2023 sebesar 70 % dan terrealisasi 96,99% atau capaian kinerja sebesar 138 %. Nilai capaian dari realisasi indikator persentase ketaatan terhadap RTRW di peroleh dengan membandingkan persentase luas lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan persentase ketidaksesuai pemanfaatan ruangnya dibagi luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.Adapun aturan pemanfaatan ruang yang dijadikan acuan adalah rencana pola ruang Kabupaten Kutai Kartanegara yang termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 – 2033 . Walaupun masuk kategori tinggi namun masih terdapat faktor kendala dari indikator pada tahun 2023 yaitu masih adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana peruntukannya.

Upaya untuk mengatasi permasalahan yaitu melaksanakan monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengendalian dalam pelaksanaan rencana struktur dan pola ruang.

Saat ini Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Revisi RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara sudah ditetapkan menjadi peraturan Daerah (Perda) no 7 Tanggal 14 November Tahun 2023.

Dengan ditetapkan revisi RTRW menjadi peraturan kepala daerah maka nilai capaian indikator ketaatan terhadap RTRW akan disesuaikan dengan arahan pola ruang yang terdapat dalam revisi RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Pengertian isu strategis menurut Permendagri 86 Tahun 2017 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Dengan demikian isu strategis merupakan permasalahan pokok yang bersifat sangat strategis dan signifikan yang dihadapi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas permasalahan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD.

isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, antara lain :

1. Proses sertipikasi aset tanah milik pemerintah daerah;
2. Belum terintegrasi sebaran peta bidang tanah SKPT dengan sertipikat hak atas tanah;
3. Belum tertibnya administrasi pertanahan di masing-masing Desa/Kecamatan seperti penertiban SKPT yang menjadi dasar pemungutan pajak atas tanah;

4. Tindak lanjut penyusunan RDTR berupa penetapan Raperkada RDTR dan integrasi RDTR ke dalam OSS..
5. Percepatan penyelesaian identifikasi dan inventarisasi penguasaaan tanah Masyarakat pada Kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk penguatan hak.

2.3.1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan dinas.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar / yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Pertanahan dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Fungsi

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
2. Pelaksanaan program kerja dan administrasi di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
3. Pelaksanaan pengawasan,monitoring dan Evaluasi di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
4. Penyusunan laporan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Adapun susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan dan mengkoordinasikan
   - Sub Bagian Umum , Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

3. Bidang Perencanaan dan Redistribusi Tanah;
4. Bidang Penatagunaan Tanah;:
5. Bidang Penanganan dan pengendalian Administrasi pertanahan
6. Bidang tata Ruang;
7. Kelompok jabatan fungsional dan Pelaksana dan
8. UPTD

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, antara lain:

1. Penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan secara hirarkis dan sistematis.
2. Belum dimilikinya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) per wilayah;
3. Adanya perbedaan kondisi antara data tata ruang dan kondisi lapangan.
4. Perlu peningkatan pengawasan dan pengendalian ruang;
5. Perlunya penertiban kepemilikan tanah oleh Pemerintah Daerah;
6. Perlunya penertiban administrasi penguasaan tanah masyarakat dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui penerbitan SKPT dan PBB;
7. Perlunya penertiban permasalahan, konflik/sengketa pertanahan dibeberapa kecamatan/desa dan ex HGU dibeberapa perusahaan baik dengan masyarakat maupun dengan yang menguasai tanah tersebut;
8. Belum terkoordinirnya data-data pertanahan dan penataan ruang dengan baik dan tersistem;

2.3.3. Dampaknya terhadap pencapian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Milenium Developmnet Goals)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang berpegang pada Visi dan Misi Organisasi Perangkat Daerah yang telah dibuat dan disepakati, yaitu sebagai berikut :

Menurut Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 , Sesuai dengan visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu dengan:

"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"

Penjabaran dari visi tersebut sebagai berikut :

a. Masyarakat yang sejahtera, Batasan pengertian sejahtera, kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan. Diharapkan dari kemudahan mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat dan perekonomian, masyarakat semakin sejahtera.
b. Masyarakat yang berbahagia, Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketenteraman Diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong-royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dari menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat membuat warga Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berbahagia

Selain visi dan Misi, pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan filosofi pembangunan Kukar tahun 2021-2026 yaitu Kukar Idaman. Idaman secara etimologi berarti sesuatu yang diharapkan, yang didambakan, yang dicita-citakan. Sedangkan untuk akronim berarti inovatif, daya saing dan mandiri (Idaman). Kukar Idaman ialah satu gerakan yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong kreatifitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dan menciptakan daya saing kemandirian yang didasari semangat kolaborasi dan sinegisitas antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mewujudkan Kukar lebih baik ke depan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang ditetapkan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan;

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sesuai tugasnya membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian beberapa misi pembangunan, di antaranya :

1. *Pencapaian Misi I :* Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani

   Dalam pelaksanaan misi ini, Tujuan dan Sasaran yang dituju adalah :

   Tujuan : Terwujudnya tertib administrasi pertanahan

   Sasaran : Meningkatnya penataan,penguasaan dan pemanfaatan pertanahan

2. *Pencapaian Misi IV :* Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah

   Dalam pencapaian misi ini Tujuan dan Sasaran yang dituju adalah sebagai berikut :

   Tujuan : Terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang produktif dan berkelanjutan

   Sasaran : Pembangunan dan Pemanfaatan sesuai Arahan Pola Ruang

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

1. Penyelesaian Sertifikasi Lahan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Meyelesaikan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah di beberapa Wilayah Di Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Mengatasi ketidakperpaduan rencana tata ruang dengan kondisi lapangan;
4. Mengembangkan sarana dan prasarana SIG (Sistem Informasi Geografi) Pertanahan dan penataan ruang.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabuapaten Kutai Kartanegara

merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2023 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan , tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

Pada rancangan rencana kerja tahun 2024 akan di sinkronisasi dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga menjadi rumusan program dan kegiatan yang definitif untuk dijadikan rencana kerja tahun 2025.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, yang dilakukan melalui tahapan :

1. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai proses tersebut
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang disajikan dalam tabel terlampir.

Tabel. TC-31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			Pagu Selisih	Catatan Penting
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
							Tolok Ukur	Target			
	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang				16,179,655,600.00				44,686,891,202.00	28,507,235,602.00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				2,300,000,000.00				3,500,000,000.00	1,200,000,000.00	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				900,000,000.00				1,600,000,000.00	700,000,000.00	
1	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang									-	

		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	250,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250,000,000.00	-	Dokumen Kebijakan Perda/Perkada terkait tata ruang (biaya tenaga ahli untuk penyusunan Dokumen Kebijakan Perda/Perkada terkait tata ruang)
2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota									-	
		Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	200,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	700,000,000.00	500,000,000.00	Dokumen rancangan peraturan kepala daerah yang telah mendapat persetujuan substansi (biaya tenaga ahli untuk pelaksanaan persetujuan substansi RDTR)
3	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota									-	
		dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	1 Dokumen	200,000,000.00	100,000,000.00	Dokumen rancangan peraturan kepala daerah yang telah melalui proses harmonisasi dan fasilitasi (biaya tenaga ahli untuk pelaksanaan persetujuan substansi RDTR)
4	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota									-	

		Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200,000,000.00	100,000,000.00	Dokumen peraturan kepala daerah tentang RDTR (biaya tenaga ahli untuk pelaksanaan persetujuan substansi RDTR)
5	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang									-	
		Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	250,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	4 Laporan	250,000,000.00	-	Laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang (belanja honorarium narasumber dan Seminar KIT)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				400,000,000.00				500,000,000.00	100,000,000.00	
6	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota									-	
		Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	200,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250,000,000.00	50,000,000.00	Dokumen materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota(biaya tenaga ahli untuk penyusunan RDTR)
7	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang									-	

		Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	200,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	20 Orang	250,000,000.00	50,000,000.00	Pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM bidang Tata Ruang (Seminar Kit dan Honorarium Narasumber)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				450,000,000.00				450,000,000.00	-	
8	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang									-	
		Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Layanan	300,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	10 Layanan	300,000,000.00	-	Pelaksanaan Pelayanan Permohonan KKPR dan Pengenalan KKPR
9	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang									-	
		Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Sistem Informasi	150,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	150,000,000.00	-	Pembaruan dan Peningkatan Aplikasi Sistem Informsi dan Komunikasi Penataan Ruang
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				550,000,000.00				950,000,000.00	400,000,000.00	

10	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang									-	
		Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Kasus	150,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	10 Kasus	150,000,000.00	-	
11	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang									-	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	200,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	200,000,000.00	-	
12	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR									-	
		Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Kasus	200,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	10 Kasus	200,000,000.00	-	
13	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK										

		Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	400,000,000.00		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10,894,855,936.00				16,702,091,538.00	5,807,235,602.00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				125,000,000.00				1,000,000,000.00	875,000,000.00	
14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									-	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	75,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	450,000,000.00	375,000,000.00	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, Pembuatan RENSTRA, Penyusunan Dokumen RKA/DPA Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50,000,000.00		
16	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									-	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	50,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	150,000,000.00	100,000,000.00	Pembuatan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) , Penyusunan dokumen SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan Managemen Resiko Dinas Pertanahan dan penataan Ruang
17	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										

		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50,000,000.00		
18	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	250,000,000.00		
20	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Data	50,000,000.00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8,229,050,452.00				10,278,142,578.00	2,049,092,126.00	

21	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									-	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74 Orang/bulan	7,979,050,452.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	9,978,142,578.00	1,999,092,126.00	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
22	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa		-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25,000,000.00		
23	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									-	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	2 Laporan	250,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	250,000,000.00	-	Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan II Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
24	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										

		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa		-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	25,000,000.00		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				50,000,000.00				105,000,000.00	55,000,000.00	
25	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa		-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25,000,000.00		
26	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD										
		Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa		-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50,000,000.00		
27	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									-	

		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30,000,000.00	(20,000,000.00)	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Semester I dan II Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Administras Kepegawaian Perangkat Daerah				-				600,000,000	600,000,000.00	
28	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa		-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Laporan	300,000,000		
29	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan									-	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	1 Paket	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	118 Paket	300,000,000	300,000,000.00	Pelaksanaan Paket Pakaian Olahraga Lengkap untuk 118 Orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				755,000,000.00				936,410,000.00	181,410,000.00	

30	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								-	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	1 Paket	35,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	66,410,000.00	31,410,000.00	
31	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								-	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	1 Paket	105,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	105,000,000.00	-	Terpenuhinya ketersediaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
32	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								-	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	1 Paket	210,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	210,000,000.00	-	Paket Bahan Logistik Kantor, Paket Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, Paket Makanan dan Minuman Rapat
33	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								-	

		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	1 Paket	60,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	60,000,000.00	-	Paket Cetak, Paket Penggandaan/Fotocopy
34	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									-	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	15,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15,000,000.00	-	
35	Penyediaan Bahan/Material										
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa		-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	150,000,000.00		
36	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									-	

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Laporan	230,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	230,000,000.00	-	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Kaltim
37	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									-	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	100,000,000.00	-	Paket Penataan Arsip Dinamis Statis melalui Jasa Pihak Ketiga
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								900,000,000.00	900,000,000.00	
38	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa		-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	700,000,000.00		

39	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									-	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	200,000,000.00	200,000,000.00	Belanja Modal Personal Computer dan Belanja alat untuk kegiatan kantor - bahan komputer
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,418,305,484.00				1,880,038,960.00	461,733,476.00	
40	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									-	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	5 Laporan	215,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	522,342,000.00	307,342,000.00	Penyediaan Jasa : Air, Listrik, Telepon, Innternet dan TV Berlangganan (5 Laporan x 12 Bulan) dan Paket Penambahan Daya Listrik
41	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									-	

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	1,203,305,484.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1,357,696,960.00	154,391,476.00	Penyesuaian iuran Jaminan Kesehatan Non ASN Tahun 2024 dan Jasa Tenaga Keamanan Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				317,500,000.00				1,002,500,000.00	685,000,000.00	
42	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									-	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	6 Unit	67,500,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	67,500,000.00	-	
43	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									-	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	6 Unit	250,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	250,000,000.00	-	
44	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa		-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit	85,000,000.00		
45	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									-	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa		-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	600,000,000.00		
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				300,000,000.00				700,000,000.00	400,000,000.00	
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				300,000,000.00				700,000,000.00	400,000,000.00	
46	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									-	

		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Berita Acara	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	350,000,000.00	250,000,000.00	Diperlukan data dukung kasus permasalahan pertanahan dari Desa , Kelurahan dan Kecamatan sehingga diperlukan pembangunan sistem manajemen pengaduan sengketa tanah garapan terintergrasi di Kecamatan
47	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									-	
		Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	200,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	350,000,000.00	150,000,000.00	Untuk melakukan inventarisasi kasus pertanahan dan memantau kasus sesuai dengan tipologinya di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan, diperlukan beberapa kajian dan penggunaan aplikasi tertentu.
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				350,000,000.00				20,300,000,000.00	19,950,000,000.00	
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				350,000,000.00				20,300,000,000.00	19,950,000,000.00	

48	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									-	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	350,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	20,300,000,000.00	19,950,000,000.00	Penambahan Anggaran Untuk Pengadaan Tanah Kepentingan Umum : Pengadaan Tanah Perluasan Kantor Camat Muara Muntai, Pengadaan Tanah Pembangunan Kantor Desa Terpadu Desa Muara Muntai ilir, Pengadaan tanah untuk TPA Sebulu, Pengadaan TPA Kembang Janggut, Pengadaan TPST Kenohan, Pembebasan lahan lamin adat dayak Loa Duri Ilir, Pembebasan Lahan Puskesmas Loa Janan, Pembebasan tanah untuk TPA Tenggarong
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				600,000,000.00				900,000,000.00	300,000,000.00	

	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				400,000,000.00				700,000,000.00	300,000,000.00	
49	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah									-	
		Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000.00	-	
50	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									-	
		Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen	400,000,000.00	300,000,000.00	Percepatan penyelesaian identifikasi dan inventarisasi penguasaaan tanah Masyarakat pada Kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk penguatan hak
51	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota									-	

		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000.00	-	
52	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah									-	
		Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000.00	-	
	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				200,000,000.00				200,000,000.00	-	
53	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									-	
		Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200,000,000.00	100,000,000.00	
	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									-	

		Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	(100,000,000.00)	Pagu anggaran Subkegiatan Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota digeser untuk subkegiatan Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT				300,000,000.00				300,000,000.00	-	
	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota				300,000,000.00				300,000,000.00	-	
54	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									-	
		Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	100,000,000.00	-	

55	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									-	
		Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000.00	-	
56	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku									-	
		Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota	1 Dokumen	100,000,000.00	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				834,799,664.00				834,799,664.00	-	
	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong				100,000,000.00				100,000,000.00	-	
57	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									-	

		Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan	100,000,000.00	-	
	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong				734,799,664.00				734,799,664.00	-	
58	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong									-	
		Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	100,000,000.00	-	Inventarisasi dan Identifikasi tanah aset pemda
59	Pemanfaatan Tanah Kosong									-	
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	634,799,664.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	634,799,664.00	-	Paket Dokumen Tanah Pemda (Fasilitasi Sertifikat Tanah pemda)
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH				200,000,000.00				850,000,000.00	650,000,000.00	

	Penerbitan Izin Membuka Tanah				200,000,000.00				850,000,000.00	650,000,000.00	
60	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah									-	
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	200,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1 Dokumen	850,000,000.00	650,000,000.00	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan/penggunaan tanah berdasarkan IMT / SKPT yang diterbitkan
61	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara									-	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	0	-	-	
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				400,000,000.00				600,000,000.00	200,000,000.00	
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				400,000,000.00				600,000,000.00	200,000,000.00	
62	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah									-	

		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	200,000,000.00	100,000,000.00	
63	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota									-	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	2 Dokumen	300,000,000.00	200,000,000.00	Pagu Anggaran untuk Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah dan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah
64	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota									-	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	(100,000,000.00)	pagu anggaran Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota digeser untuk subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
65	Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul								-	-	

		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul	1 Dokumen	100,000,000.00	-	Koordinasi dan Identifikasi Status Tanah Timbul

2.5 Penelahaan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang untuk tahun 2025 berasal dari usulan Kecamatan dan merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Usulan program dan kegiatan selanjutnya akan diakukan verifikasi ulang menyesuaikan dengan tujuan, indikator, dan lokasi Prioritas Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dengan juga memperhatikan dukungan anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab Kutai Kartanegara.

Tabel TC.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
1	Pengadaan tanah Hutan Kota	Kec.Tenggarong		1,4 Ha	
2	Pengadaan tanah Perluasan Kantor Kecamatan dan Kantor Desa Muara Muntai Ilir	Kec. Muara Muntai Ilir		-	Luasan Belum diketahui
3	Penambahan Anggaran utnuk pengadaan tanah TPA Sebulu	Kec. Sebulu		3 Ha	
4	TPA Kembang Janggut 4 Ha	Kec. Kembang Janggut		4 Ha	
5	TPA Kenohan	Kec.Kenohan		2 Ha	
6	Pembebasan lahan lamin adat dayak Loa Duri Ilir	Kec.Loa Duri Ilir		2 Ha	
7	Pembebasan Lahan Puskesmas KM 4 Loa Janan	Kec.Loa Janan		-	Luasan Belum diketahui

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
8	Belum ada ruang hijau terbuka (Taman dan Sarana Pendukung)	ln. Perkutut RT 003 Dusun Cipari, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Cipari Makmur		-	Bukan Pengadaan Tanah
9	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pemerintahan desa guna memperlancar pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat seperti fasilitas tempat dan peralatan yang digunakan untuk melayani masyarakat Fasilitasi sarana	Pembangunan Taman Desa Kota Bangun II, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Kota Bangun II		-	Bukan Pengadaan Tanah
10	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pemerintahan desa guna memperlancar pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat seperti fasilitas tempat dan peralatan yang digunakan untuk melayani masyarakat	Pengadaan Alat Berat Eksa mini, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Kota Bangun II		-	Bukan Pengadaan Tanah
11	Pembebasan Lahan Puskesmas	KM 4 Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Janan Ulu		-	Luasan Belum diketahui
12	Di desa loa duri ilir Perlu adanya Taman Bunga dengan berbagai jenis Bunga hias maupun tanaman endemic asli Kalimantan.melihat antusias masyarakat belakangan ini yang sering sekali berpergian ke lokasi-lokasi wisata bunga,oleh karena itu kami memohon bantuan untuk dibangunkannya Taman Bunga ini	Desa loa duri ilir Wisata desa, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir		-	Bukan Pengadaan Tanah
13	Desa Loa Duri Ilir kaya akan adat dan istiadat berbagai macam dan jenis suku budaya.oleh karenannya desa loa duri ilir memohon bantuan untuk pembebasan lahan lamin adat dayak.ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan budaya.dan juga sebagai tempat untuk beberapa acara budaya dayak yang masyarakat adakan didesa loa duri ilir	Desa loa duri ilir Dusun putak, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir		2 Ha	
14	Pengadaan Lahan TPA Tabang	Kec. Tabang		2 Ha	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Telahaan terhadap kebijakan nasional merupakan penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemisikinan, infrastruktur, ketahanan pangan, iklim usaha dan investasi. Lingkungan hiduo, hukum dan keamanan Provinsi yang terkait dengan pembangunan Kabupaten.

Kebijakan yang dibuat Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang merupakan tindak lanjut kebijakan Kabupaten Kutai kartanegara dalam pengaturan dan pengelolaan bidang Pertanahan dan Tata Ruang.

Tabel III.1

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
	Nasional		
	PENATAAN RUANG		
1	Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis	RPJMN 2015-2019 Bindang Tata Ruang dan Pertanahan (PP No.2 Tahun 2015)	
2	Meningkatkan pembinan kelembagaan penataan ruang		
3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang		
4	Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataaan ruang, melalui pemantauan dan evaluasi yang terukur		
	PERTANAHAN		
1	Membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif	RPJMN 2015-2019 Bindang Tata Ruang dan Pertanahan (PP No.2 Tahun 2015)	

2	Reforma agraria melalui redistribusi tanah, pemberian tanah dan bantuan Pemberdayaan masyarakat		

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapau melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang dalam tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (Lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan tersebut lah maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan

kemampuan yang dimiliki, serta faktor – faktor eksternal lainnya. Adapun sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh organisasi dalam hal ini Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara. Sasaran merupakan salah satu dasar penilaian kinerja sehingga memicu organisasi untuk berupaya se optimal mungkin untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagaimana pada lampiran tabel III.2 berikut :

Tebel III.2

Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan		Cakupan Pelayanan Pertanahan	60	70	80	90	100
		Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	80	85	90	100	100
			Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	70	75	80	85	90
			Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan ke Masyarakat	83	86	90	95	100
			Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	82	83	84	85	86
			Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat	55	60	65	70	75
2	Terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang produktif dan berkelanjutan		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	65	70	75	80	85

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		Meningkatnya Pembangunan dan Pemanfaatan sesuai Arahan Pola Ruang	Persentase ketaatan terhaPdap RTRW	65	70	75	80	85

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2025 serta Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun Kabupaten Kutai kartanegara 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Kukar Idaman Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupatern Kutau kartanegara . Dalam hal ini, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun Kabupaten Kutai kartanegara memiliki peran dalam pencapaian tujuan dan sasaran yaitu “Terwujudnya tertib administrasi pertanahan”, Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan dan “Terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang produktif dan berkelanjutan” Meningkatnya Pembangunan dan Pemanfaatan sesuai Arahan Pola Ruang .
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun Kabupaten Kutai kartanegara;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan

program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

4.1. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam pembangunan daerah.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Kutai Kartanegara dan Visi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025 sebagaimana yang pada tabel di bawah ini berikut dengan perkiraan maju tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel C-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang				44,686,891,202.00				16,179,655,600.00
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				3,500,000,000.00				2,300,000,000.00
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				1,600,000,000.00				1,050,000,000.00
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang								
						Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	250,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Dokumen Kebijakan Perda/Perkada terkait tata ruang (biaya tenaga ahli untuk penyusunan Dokumen Kebijakan Perda/Perkada terkait tata ruang)	1 Dokumen	
1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota								

						Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	700,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Dokumen rancangan peraturan kepala daerah yang telah mendapat persetujuan substansi (biaya tenaga ahli untuk pelaksanaan persetujuan substansi RDTR)	1 Dokumen	400,000,000.00
1	03	12	2.01	0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota								
						dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	200,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Dokumen rancangan peraturan kepala daerah yang telah melalui proses harmonisasi dan fasilitasi (biaya tenaga ahli untuk pelaksanaan persetujuan substansi RDTR)	1 Dokumen	400,000,000.00
1	03	12	2.01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota								
						Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	200,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Dokumen peraturan kepala daerah tentang RDTR (biaya tenaga ahli untuk pelaksanaan persetujuan substansi RDTR)	1 Dokumen	
1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang								

						Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	250,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang (belanja honorarium narasumber dan Seminar KIT)	4 Laporan	250,000,000.00
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				500,000,000.00				-
1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota								
						Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	250,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Dokumen materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota(biaya tenaga ahli untuk penyusunan RDTR)	1 Dokumen	-
1	03	12	2.02	0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang								
						Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	250,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM bidang Tata Ruang (Seminar Kit dan Honorarium Narasumber)	20 Orang	-
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				450,000,000.00				550,000,000.00
1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang								

						Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Layanan	300,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pelaksanaan Pelayanan Permohonan KKPR dan Pengenalan KKPR	10 Layanan	400,000,000.00
1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang								
						Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Sistem Informasi	150,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pembaruan dan Peningkatan Aplikasi Sistem Informsi dan Komunikasi Penataan Ruang	1 Sistem Informasi	150,000,000.00
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				950,000,000.00				700,000,000.00
1	03	12	2.04	0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang								
						Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Kasus	150,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		10 Kasus	150,000,000.00
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang								

						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	200,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	300,000,000.00
1	03	12	2.04	0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR								
						Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Kasus	200,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		10 Kasus	250,000,000.00
1	03	12	2.04	0	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK								
						Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	400,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
2	10	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16,702,091,538.00				10,969,855,936.00
2	10	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,000,000,000.00				200,000,000.00
2	10	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	450,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, Pembuatan RENSTRA, Penyusunan Dokumen RKA/DPA Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	3 Dokumen	125,000,000.00
2	10	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
2	10	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	150,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pembuatan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) , Penyusunan dokumen SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan Managemen Resiko Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	2 Laporan	75,000,000.00
2	10	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
2	10	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah								

						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Data	250,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
2	10	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Data	50,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
2	10	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10,278,142,578.00					8,229,050,452.00
2	10	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74 Orang/bulan	9,978,142,578.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	74 Orang/bulan	7,979,050,452.00
2	10	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									

						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	1 Laporan	25,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
2	10	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	2 Laporan	250,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan II Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2 Laporan	250,000,000.00
2	10	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	1 Laporan	25,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
2	10	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				105,000,000.00				50,000,000.00
2	10	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									

						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
2	10	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD									
						Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
2	10	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	2 Laporan	30,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Semester I dan II Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2 Laporan	50,000,000.00	
2	10	01	2.04		Administras Kepegawaian Perangkat Daerah				600,000,000				-	
2	10	01	2.04	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									

						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	1 Laporan	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pelaksanaan Pelatihan Mandiri yang akan disesuaikan denga Kebutuhan pada Tahun Berjalan		-
2	10	01	2.04	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	118 Paket	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pelaksanaan Paket Pakaian Olahraga Lengkap untuk 118 Orang		-
2	10	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				936,410,000.00				755,000,000.00
2	10	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	1 Paket	66,410,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	35,000,000.00
2	10	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	1 Paket	105,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Terpenuhinya ketersediaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	105,000,000.00
2	10	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	1 Paket	210,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Paket Bahan Logistik Kantor, Paket Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, Paket Makanan dan Minuman Rapat	1 Paket	210,000,000.00
2	10	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	1 Paket	60,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Paket Cetak, Paket Penggandaan/Fotocopy	1 Paket	60,000,000.00
2	10	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								

						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	15,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	15,000,000.00
2	10	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	1 Paket	150,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			-
2	10	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Laporan	230,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Kaltim	15 Laporan	230,000,000.00
2	10	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								

						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Paket Penataan Arsip Dinamis Statis melalui Jasa Pihak Ketiga	1 Dokumen	100,000,000.00
2	10	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				900,000,000.00				-
2	10	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	700,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			-
2	10	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	-	200,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Belanja Modal Personal Computer dan Belanja alat untuk kegiatan kantor - bahan komputer		-
2	10	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,880,038,960.00				1,418,305,484.00

2	10	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	60 Laporan	522,342,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyediaan Jasa : Air, Listrik, Telepon, Innternet dan TV Berlangganan (5 Laporan x 12 Bulan) dan Paket Penambahan Daya Listrik	60 Laporan	215,000,000.00
2	10	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	1,357,696,960.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penyesuaian iuran Jaminan Kesehatan Non ASN Tahun 2024 dan Jasa Tenaga Keamanan Kantor	2 Laporan	1,203,305,484.00
2	10	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,002,500,000.00				317,500,000.00
2	10	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	11 Unit	67,500,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		11 Unit	67,500,000.00

2	10	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	6 Unit	250,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		6 Unit	250,000,000.00
2	10	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	30 Unit	85,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			-
2	10	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	1 Unit	600,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			-
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				700,000,000.00				300,000,000.00
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				700,000,000.00				300,000,000.00

2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Berita Acara	350,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Diperlukan data dukung kasus permasalahan pertanahan dari Desa , Kelurahan dan Kecamatan sehingga diperlukan pembangunan sistem manajemen pengaduan sengketa tanah garapan terintergrasi di Kecamatan	2 Berita Acara	100,000,000.00
2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	350,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Untuk melakukan inventarisasi kasus pertanahan dan memantau kasus sesuai dengan tipologinya di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan, diperlukan beberapa kajian dan penggunaan aplikasi tertentu.	2 Dokumen	200,000,000.00
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				20,300,000,000.00				350,000,000.00
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				20,300,000,000.00				350,000,000.00

2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	20,300,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penambahan Anggaran Untuk Pengadaan Tanah Kepentingan Umum : Pengadaan Tanah Perluasan Kantor Camat Muara Muntai, Pengadaan Tanah Pembangunan Kantor Desa Terpadu Desa Muara Muntai ilir, Pengadaan tanah untuk TPA Sebulu, Pengadaan TPA Kembang Janggut, Pengadaan TPST Kenohan, Pembebasan lahan lamin adat dayak Loa Duri Ilir, Pembebasan Lahan Puskesmas Loa Janan, Pembebasan tanah untuk TPA Tenggarong	3 Dokumen	350,000,000.00
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				900,000,000.00				600,000,000.00

2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				700,000,000.00				400,000,000.00
2	10	06	2.01	0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah								
						Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	100,000,000.00
2	10	06	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	400,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Percepatan penyelesaian identifikasi dan inventarisasi penguasaaan tanah Masyarakat pada Kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk penguatan hak	1 Dokumen	100,000,000.00
2	10	06	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	100,000,000.00

2	10	06	2.01	0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah								
						Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	100,000,000.00
2	10	06	2.02		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				200,000,000.00				200,000,000.00
2	10	06	2.02	0001	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	200,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	100,000,000.00
2	10	06	2.02	0002	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								

						Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pagu anggaran Subkegiatan Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota digeser untuk subkegiatan Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000.00
2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT				300,000,000.00				300,000,000.00
2	10	07	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota				300,000,000.00				300,000,000.00
2	10	07	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								

						Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Laporan	100,000,000.00
2	10	07	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	100,000,000.00
2	10	07	2.01	0003	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku								
						Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	100,000,000.00
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				834,799,664.00				934,799,664.00
2	10	08	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong				100,000,000.00				100,000,000.00

2	10	08	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								100,000,000.00
						Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Laporan	
2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong				734,799,664.00				834,799,664.00
2	10	08	2.02	0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong								
						Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Inventarisasi dan Identifikasi tanah aset pemda	1 Laporan	100,000,000.00
2	10	08	2.02	0002	Pemanfaatan Tanah Kosong								
						Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	634,799,664.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Paket Dokumen Tanah Pemda (Fasilitasi Sertifikat Tanah pemda)	1 Dokumen	734,799,664.00
2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH				850,000,000.00				200,000,000.00

2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah				850,000,000.00				200,000,000.00
2	10	09	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah								
						Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	850,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan/penggunaan tanah berdasarkan IMT / SKPT yang diterbitkan	1 Dokumen	200,000,000.00
2	10	09	2.01	0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara								
						Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Diperlukan sebaran peta bidang tanah SKPT yang terintegrasi dengan sebaran sertipikat hak atas tanah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah (PBB dan BPHTB)		-
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				600,000,000.00				300,000,000.00
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				600,000,000.00				300,000,000.00
2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah								

						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	200,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Laporan	100,000,000.00
2	10	10	2.01	0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	300,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pagu Anggaran untuk Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah dan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah	1 Dokumen	100,000,000.00
2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota								

						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	pagu anggaran Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota digeser untuk subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		-
2	10	10	2.01	0005	Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul				-				
						Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Koordinasi dan Identifikasi Status Tanah Timbul	1 Dokumen	100,000,000.00

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan,sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang kanupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sub kegiatan. Selanjutnya penyesuaian ini akan diakomodir pada saat dilakukannya review terhadap Renstra.

b. Kaidah Pelaksanaan

1. Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA dan DPA dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh

Inspektorat Kabupaten dan berdasarkan hasil pembahasan DPRD Kabupaten serta evaluasi Provinsi.

c. Rencana tindak lanjut

1. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan renja setiap triwulan;
2. Jika hasil evaluasi dan pengendalian memunjukkan adanya penyesuaian terhadap target dan sasaran maka dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan akan dimuat dalam perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang .

Dengan ditetapkannya Renja PD Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi wujud pertanggungjawaban Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai kartanegara dalam melaksanakan rencana strategis dinas.

o. RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang di lakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah secara sistematis terarah terpadu menyeluruh dan tanggapan terhadap perubahan yang berjangka panjang, menengah dan jangka pendek, sebagaimana di amanatkan dalam UU nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah harus menyusun rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah juga melaksanakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, dimana penyelenggaraan Tata Pemerintah melakukan Pengintegrasian Gender melalui kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran.

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis dan implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 di mana Renja merupakan dokumen perencanaan OPD untuk 1(satu) tahunan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dalam Rencana Kerja memuat visi misi tujuan kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah dan berorientasi pada hasil yang akan di capai selama kurun waktu 1 tahun .

Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang Sosial Budaya, Ekonomi, Politik dan Keamanan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Dalam RPJM Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sesuai Visi Bupati yaitu : “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia“ diamanatkan lima misi pembangunan Kutai Kartanegara dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masuk adamisi ke dua yaitu

“MENINGKATNYA PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA, UNGGUL DAN BERBUDAYA “

Dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai OPD pendukung yang juga menpunyai tanggungjawab terhadap terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Terdapat beberapa persoalan- persoalan pembangunan yang telah dirumuskan dan harus segera diatasi yaitu belum optimalnya peranan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan (kesetaraan gender). Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan rencana kerja dalam rangka penentuan kebijakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam misi ke dua RPJMD pembangunan tersebut.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun pelaksanaan Penyusunan Rencana (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 memperhatikan kepada peraturan Perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Renja dan arah garis kebijakan terkait yang di rumuskan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 50);
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari dibuatnya Rencana kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah :

1. Untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara Periode 2021-2026.
2. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Pembangunan Daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

1 Menciptakan keterpaduan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai Visi Misi Pemerintah Daerah.

2 Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu terarah dan terukur.

3 Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan Operasional Tahunan dalam rentang waktu 1 tahun.

4 Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA –PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dab Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

BAB IV RENACANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja –PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD

Proses Penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan permasalahan- permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut, hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Kerja (RENJA) suatu Perangkat Daerah adalah Penjabaran Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut, tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan, Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur, Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu suatu kebijakan / Program / kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut
telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah di
tetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran dan hasil. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini di ikuti dengan penetapan besarnya indicator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah di tetapkan. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja di lakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini di lakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Adapun capaian analisis kinerja dan rekapitulasi pelaksanaan Renja sebagaimana mestinya.

Pada tahun 2025 Rencana Kerja Dinas PPPA dengan indikator yang ingin dicapai sesuai dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah pada tahun tersebut sebanyak 7 Program terdiri dari dari 1 program Generik dengan Outcome yang ingin dicapai sebanyak 1 indikator Outcome dan 6 program wajib dengan Outcome yang ingin dicapai sebanyak 6 indikator Outcome dengan pagu program kegiatan yang direncanakan sebesar Rp. 28.415.005.266,-

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu 2023 dan realisasi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan atau realisasi APBD .

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Indikator kinerja program Nilai Sakip Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp.13.473.297.958,- dan realisasinya Rp. 12.249.400.032,- atau sebesar 90.92% capaian kinerja 100%. Target kinerja tercapai.
2) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Indikator kinerja program adalah Persentase ARG belanja langsung APBD tahun 2023 yaitu dengan anggaran sebesar Rp. 4.672.780.083,- dan realisasinya Rp. 3.178.406.278,- atau sebesar 68.02% capaian kinerja sebesar 80%. Target kinerja belum tercapai.

a. Penyusunan GAP dan GBS dari setiap kegiatan/subkegiatan masih rendah sehingga prosentase ARG pada Belanja Langsung APBD belum terhitung,
b. SDM Perencana dari setiap OPD yang sudah dilatih tentang PPRG banyak yang dimutasi.
c. Solusi/Rekomendasinya melakukan pelatihan secara continuitas terhadap OPD sehingga paham terhadap cara pengisian GAP dan GBS. Membuat aplikasi yang mudah supaya bisa diakses oleh OPD sehingga analisis GAP dan GBS bisa tercapai

3) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak indicator kinerja program adalah Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Data Gender tahun 2023 yaitu dengan anggaran sebesar Rp330.718.362,- realisasinya Rp318.423.661,- atau 96.28 % capaian kinerja sebesar 100% . Target kinerj tercapai.

4) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Indikator kinerja program adalah Persentase Kabupaten Layak Anak tahun 2023 yaitu dengan anggaran sebesar Rp868.000.000,- realisasinya Rp739.557.871,- atau 88.50 % capaian kinerja sebesar 90% Kendala yang dihadapi adalah :
a. Tingkat Pergantian staf yang mengelola dan menangani KLA disetiap perangkat Daerah sering berganti/mutasi.
b. Mengikuti jadwal kementerian yg beruba-ubah
c. Dukungan semua stekholder belum maksimal.
d. Terkendala Letak geografis dan luas Wilayah Kab.Kutai Kartanegara
e. Ranah kebijakan Kepala Daerah untuk melakukan mutasi pada jabatan tertentu menjadi hak prerogatif dan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk bisa menyikapi dan memberikan solusi terbaiknya jika terdapat pejabat atau staf yang mengelola dan menangani data persyaratan KLA beraganti atau mutasi.
f. Sesuai jadwal kementrian
g. Surat Edaran Bupati kepada semua stekholder supaya memberikan dukungan untuk mencapai peringkat Kabupaten Layak Anak

h. Dengan memberikan sarana dan prasarana dukungan KLA
i. Solusi/Rekomendasinya melakukan rapat koordinasi dengan Tim Gugus Tugas KLA untuk memberikan kebijakan sesuai permasalahan.

5) Program Peningkatan Kualitas Keluarga Indikator kinerja Persentase peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak tahun 2023 yaitu dengan anggaran sebesar Rp315..000.000,- realisasinya Rp272.229.900,- atau 86.42% capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.

6) Program Perlindungan Perempuan Indikator kinerja Cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2023 yaitu dengan anggaran sebesar Rp.1.074.100.000,- realisasinya Rp845.204.612,- atau 78.69% capaian kinerja sebesar 90%. Kendala yang dihadapi :
   a. Waktu pelaksanaan kegiatan yang sering berubah-ubah
   b. Jangkauan pendampingan jauh dari perkotaan
   c. Jaringan telekomukikasi yang kurang lancar
   d. Solusi/Rekomendasinya mengkoordinasikan secara intens dengan pihak terkait supaya penjadwalan sesuai rencana

7) Program Perlindungan Khusus Anak Indikator Kinerja Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten tahun 2023 yaitu dengan anggaran sebesar Rp1.704.700.000,- realisasinya capaian kinerja sebesar Rp1.462.203.652,- atau 85.80%, capaian kinerja sebesar 100%. Kendala yang dihadapi adalah :
   a. Waktu pelaksanaan kegiatan tidak maksimal sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran terhadap pelayanan perlindungan khusus anak.
   b. Letak geografis yang jauh dalam penjangkauan kasus yang belum didukung dengan tenaga professional yang masih kurang.
   c. Solusi/Rekomendasinya rencana anggaran kas tiap triwulan, penambahan tenaga professional dan pemenuhan sarana dan prasarana

Sedangkan pada tahun 2023 terjadi peningkatan anggaran dari tahun 2022, anggaran yang dikelola oleh Dinas PPPA sebesar 21.520.596.403,- atau terdpat kenaikan anggaran sebesar 51% sehingga akan berpengaruh terhadap capaian indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Program yang akan ditargetkan sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Indikator kinerja program adalah Persentase ARG belanja langsung APBD target 16.10%,
2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Indikator Persentase PD yang memiliki Data Gender 81.03%.
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga Indikator kinerja Persentase peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak target 50%.
4. Program Perlindungan Perempuan Indikator kinerja Cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan target 100%
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Indikator kinerja program adalah Persentase Kabupaten Layak Anak target 790%
6. Program Perlindungan Khusus Anak Indikator Kinerja Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten target 100%

Tabel 2.1 (TC_29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023 Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja- PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja- PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 8 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	76,60	76,11	76,35	74.90	99,69	76,40	73,55	96,02
2 8 1 2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,00	7,00	7,00	7,00	100,00	7,00	21,00	60,00
2 8 1 2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	15,00	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00	9,00	60,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja								

2	8	1	2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,00	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00	12,00	20,00
2	8	1	2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	120,00	12,00	12,00	6,00	50,00	12,00	30,00	25,00

2	8	1	2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60,00	12,00	12,00	6,00	50,00	12,00	30,00	50,00
2	8	1	2.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60,00	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00	36,00	60,00
2	8	1	2.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	20,00	4,00	4,00	2,00	50,00	4,00	10,00	50,00
2	8	1	2.3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20,00	4,00	4,00	2,00	50,00	4,00	10,00	50,00
2	8	1	2.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
2	8	1	2.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100,00	53,00	40,00	20,00	50,00	40,00	120,00	120,00
2	8	1	2.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	20,00
2	8	1	2.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00	60,00	60,00
2	8	1	2.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	60,00

2	8	1	2.6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5000,00	1000,00	1000,00	1000,00	100,00	1,00	3000,00	60,00
2	8	1	2.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10560,00	2112,00	2112,00	2112,00	100,00	1,00	6336,00	60,00
2	8	1	2.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60,00	1,00	12,00	1,00	8,33	2,00	14,00	23,33
2	8	1	2.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265,00	53,00	48,00	20,00	42,00	2,00	75,00	28,00
2	8	1	2.6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
2	8	1	2.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	30,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	20,00
2	8	1	2.7.9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25,00	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00	15,00	60,00
2	8	1	2.7.11	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
2	8	1	2.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	60,00

2	8	1	2.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60,00	12,00	12,00	6,00	50,00	12,00	30,00	50,00
2	8	1	2.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	175,00	35,00	35,00	35,00	100,00	35,00	105,00	60,00
2	8	1	2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60,00	12,00	12,00	6,00	50,00	12,00	30,00	50,00
2	8	1	2.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	140,00	28,00	28,00	28,00	100,00	28,00	84,00	60,00
2	8	1	2.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	125,00	28,00	25,00	14,00	56,00	25,00	67,00	53,60
2	8	1	2.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10,00	2,00	2,00	1,00	500,00	2,00	5,00	20,00
2	8	1	2.9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
2	8	2		2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum,Sosial, Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	26.49	8.48	12.18	8.48	69.65	12.18	29.14	110.00

2	8	2	1	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah dan Pemerintah Desa yang telah dilatih PUG	155,00	52.00	20,00	10.00	50,00	20.00	82.00	53.00
2	8	2	1.1	2.08.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	6,00	6.00	1,00	1.00	100,00	1.00	3.00	50,00
2	8	2	1.2	2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	24,00	3,00	1,00	1,00	100,00	1,00	5,00	20,83
2	8	2	1.3	2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	275,00	56,00	56,00	56,00	100,00	56,00	68,00	61,00
2	8	2	1.4	2.08.02.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender(PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	275,00	56,00	56,00	56,00	100,00	56,00	68,00	61,00
2	8	2	2 .2	2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang bergerak dlm bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	100,00	50,00	28,00	10,00	28,00	28,00	68,00	68,00

2	8	2	2.2.1	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	12,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	6,00	50,00

2	8	2	2.2.2	2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	600,00	150,00	200,00	150,00	75,00	200,00	500,00	83,33
2	8	2	2.3	2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	270,00	80,00	40,00	40,00	100,00	80,00	200,00	74,07
2	8	2	2.3.1	2.08.02.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	20,00	2,00	1,00	1,00	100,00	2,00	5,00	25,00
2	8	2	2.3.2	2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8	2	2.3.3	2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8	5		2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten	100,00	19,23	28,85	19,23	66,67	12,18	50,64	50,64

2	8	5	2.1	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	15,00	2,00	3,00	2,00	66,67	2,00	6,00	40,00
2	8	5	2.1.1	2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	6,00	1,00	1,00	1,00	100,00	3,00	5,00	83,33
2	8	5	2.1.2	2.08.05.2.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	9,00	1,00	3,00	1,00	33,33	3,00	5,00	55,60
2	8	3		2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100,00	58,54	100,00	58,54	58,54	58,54	175,62	175,62
2	8	3	2.1	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap perempuan	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,50
2	8	3	2.1.1	2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8	3	2.1.2	2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	8	3	2.2	2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi	160,00	41,00	41,00	41,00	100,00	41,00	123,00	51,25
2	8	3	2.2.1	2.08.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	110,00	40,00	40,00	40,00	100,00	0,00	80,00	111,82
2	8	3	2.2.2	2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	6,00	18,00	300,00
2	8	3	2.3	2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	75,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8	3	2.3.2	2.08.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	55,00	60,00	30,00	60,00	200,00	30,00	150,00	272,73
2	8	3	2.3.4	2.08.03.2.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	150,00

2	8	7		2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100,00	97,78	100,00	97,78	97,78	97,78	293,34	293,34
2	8	7	2.1	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah	95,00	14,00	0,00	14,00	#DIV/0!	1,00	29,00	30,53
2	8	7	2.1.1	2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8	7	2.1.2	2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	55,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2	8	7	2.2	2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan anak yang terlayani	515,00	90,00	100,00	90,00	90,00	0,00	180,00	34,95
2	8	7	2.2.1	2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan KhususTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	190,00	114,00	0,00	0,00	0,00	100,00	214,00	112,63

2	8	7	2.2.2	2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	325,00	114,00	100,00	60,00	60,00	0,00	174,00	53,54
2	8	7	2.3	2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang dibentuk	135,00	25,00	30,00	25,00	83,33	100,00	50,00	37,04
2	8	7	2..3.2	2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	50,00	10,00	0,00	0,00	0,00	30,00	40,00	80,00
2	8	7	2.3.3	2.08.07.2.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten /Kota	75,00	30,00	30,00	30,00	100,00	0,00	60,00	80,00
2	8	6		2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	810,00	620,00	750,00	640,00	85,33	750,00	640,00	79,01

2	8	6	2.1	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemenuhan hak anak yang terbentuk	17,00	10,00	4,00	2,00	50,00	4,00	16,00	94,00
2	8	6	2.1.1	2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	12,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	33,33
2	8	6	2.1.2	2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	40,00
2	8	6	2.2	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan PHA	28,00	1,00	5,00	1,00	20,00	1,00	3,00	10,72
2	8	6	2.2.1	2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10,00	1,00	1,00	1,00	100,00	4,00	6,00	60,00

2	8	6	2.2.2	2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12,00	2,00	2,00	2,00	100,00	5,00	9,00	75,00
2	8	6	2.2.3	2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8	6	2.2.4	2.08.06.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	66,67
2	8	4		2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga yang terbentuk dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	100,00	5,56	11,11	5,56	50,00	5,56	16,68	16,68
2	8	4	2.1	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	5,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	40,00
2	8	4	2.1.3	2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	8	4	2.2	2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	18,00	1,00	5,00	1,00	20,00	1,00	3,00	16,67
2	8	4	2.2.1	2.08.04.2.02.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	65,00	20,00	0,00	5,00	0,00	20,00	45,00	69,23
2	8	4	2.2.2	2.08.04.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	50,00
2	8	4	2.2.3	2.08.04.2.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	14,00	1,00	5,00	1,00	20,00	1,00	3,00	21,43
2	8	4	2.3	2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	4,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	60,00

2	8	4	2.3	2.08.04.2.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	7,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5,00	7,00	100,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dasar pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2007, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO) untuk memerangi perdagangan orang membutuhkan penanganan yang komperhensip dan multi sektor, diharapkan pemerintah daerah (Kutai Kartanegara) memiliki kerangka hukum mengenai (PTPPO) dan partisifasi setiap anggota masyarakat termasuk anggota keluarga untuk mengambil langkah pencegahan, untuk data perdagangan orang/trafficking, sebanyak 4 kasus tahun 2017, 1 kasus tahun 2022 dan 8 kasus tahun 2023.

Belum tersedianya pemetaan data khusus untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dengan adanya pemetaan kasus kekerasan ini dapat memudahkan dalam hal penanganan dimasing-masing desa /kecamatan

Perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan *trafficking* dan peningkatan layanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Meski telah ada Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, pembangunan pusat-pusat krisis terpadu di rumah sakit, pembangunan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di
Polda dan Polres, serta pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) di daerah, dan penyebaran informasi dan kampanye anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun upaya tersebut belum cukup untuk menekan tingginya tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2022 kasus yang didampingi berjumlah 65 kasus dan tahun 2023 sebanyak 155 kasus.

Untuk penanganan Korban Tindak Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara terpadu maka perlu dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta penyediaan wadah Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi dalam penanggulangan dan perlindungan Perempuan dan Anak yaitu P2TP2A.

Dilihat dari visi dan misi bupati terpilih untuk RPJMD 2021 – 2026 dengan Misi “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia” dan Visi kedua yaitu “Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya” adapun sasaran yang ingin dicapai Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, kualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak dengan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD;
2. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan);
3. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi pemerintah terkait Kabupaten.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam rangka memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan mengacu pada

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 yang terdiri dari 5 jenis pelayanan dan 22 indikator kinerja.

Dari hasil pembahasan diatas berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan memberikan pelayanan yang maksimal dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegata tahun 2021-2026. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Tabel T.C.30

Tabel T.C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Organisasi Pelayanan Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Utama	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Proyeksi	
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2026	Catatan Analisis
1	2	3	4	5					6					7	8
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-		76,35	76,40	76,45	76,5	76,60	76,35	74,90				100,00	
2	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	-	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	16,95	16,00	16,10	16,15	16,20	16,95	4,87				100,00	Kurangnya Sdm opd dalam membuat dok GAP GBS
3	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait kabupaten	-	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait kabupaten	0,21	0,25	0,29	0,33	0,37	0,21	100				100,00	
4	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	-	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	0,015	0,023	0,031	0,039	0,046	0,015	7,20				100,00	

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Peran Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang mutakhir dewasa ini, maka isu permasalahan yang masih dihadapi oleh Dinas PP dan PA Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

1. Belum Optimalnya Anggaran Responsif Gender di masing-masing Perangkat Daerah
2. Masih tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan belum didampingi seluruhnya oleh tenaga terlatih
3. Belum terpenuhinya pelayanan penanganan kasus sesuai dengan SPM
4. Belum optimalnya para pengambil kebijakan dalam membuat kebijakan yang responsif anak
5. Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap hak-hak anak
6. Kelembagaan PUG di OPD belum optimal
7. Kurangnya perempuan sebagai pelaku ekonomi yang mendapat pembinaan Dari permasalahan diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara memerlukan koloborasi dan dukungan instansi terkait dalam memberikan pelayanan dan peningkatan pemberdayaan perempuan, baik dalam bidang penddikan, kesehatan, politik, hukum, social dan ekonomi.

Sesuai amanah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Kabupaten Kota Layak Anak, dan memperhatikan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 56 thn 2010 tanggal 26 juli 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjuk sebagai 10 Kabupaten / Kota Pengembang Kota / Kabupaten Kota Layak Anak, maka barkaitan dengan hal diatas dapat diidentifikasi Implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas PP PA Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dalam rancangan program pembangunan menuju Kabupaten Layak Anak (KLA). KLA adalah Pembangunan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu sistem Pembangunan Berbasis Pemenuhan Hak Anak melalui Pengintegrasian Komitmen

dan Sumber Daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Pembangunan berbasis pada perwujudan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak secara tidak langsung akan memenuhi kebutuhan penataan ruang sebuah lingkungan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Arahan Pengembangan Pelayanan OPD:

a. Ketersediaan dan kemudahan jangkauan Lembaga Kesejahteraan Anak;
b. Jumlah Pojok ASI yang memadai dan layak, di tempat umum (Bandara, pusat perbelanjaan, terminal dll) tempat kerja;
c. Ketersediaan Rumah Tangga dengan akses air bersih;
d. Ketersediaan Kawasan tanpa asap rokok;
e. Tersedianya sekolah yang ramah Anak;
f. Ketersediaan dan kemudahan jangkauan Lembaga Kesejahteraan Anak;
g. Tersedianya sekolah yang memiliki program,sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
h. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif yang ramah anak diluar sekolah dan dapat diakses semua anak;
i. Tersedianya lembaga perlindungan anak bermasalah dengan hukum; dan
j. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan keperluan anak.

Untuk menanggulangi permasalahan dan isu-isu diatas maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan salah satunya adalah melalui :

1. Program Perlindungan Perempuan dengan Indikator Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 jumlah penduduk perempuan)
2. Program Perlindungan Anak dengan indikator Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten
3. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator Persentase ARG pada belanja langsung APBD

4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan Indikator Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan Indikator Persentase Kabuapaten Layak Anak
6. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan Indikator Persentase Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Dokumen Renstra OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 – 2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra SKPD dijabarkan setiap tahun kedalam Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA OPD yang mengacu pada kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA- PPAS).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas ada perubahan dalam sasaran strategis dimana pada awal perencanaan Renstra terdapat dua (2) sasaran, setelah dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sudah disahkan sehingga ada perubahan sasaran strategis pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dapat dilihat dibawah ini :

SEBELUM		SESUDAH	
Sasaran Strategis	Indikator Kinej a Utam a	Sasaran Strategis	Indikator Kineja Utama
Meningkatnya Partisipasi pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta Penguatan Perlindungan Perempuan dan anak	IDG	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD
			Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait kabupaten
	Ratio KDRT		Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)

Tabel 2.4 (TC_31)

Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Nama Perangkat

Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Rancangan awal RKPD						No	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	KET
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	1	9	10	11	12	13	14	15	16
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,5	Nilai	7.025.337.513	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,50	Nilai	20.262.672.445		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	dokumen	175.000.000	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	dokumen	650.000.000		

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	dokumen	100.000.000	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dokumen	200.000.000	Rakor PPPA, Renja, Renstra	kolo bora si
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	1	laporan	75.000.000	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	3	laporan	300.000.000	Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Kec	kolo bora si

			Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		laporan		3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	laporan	150.000.000	Monev kegiatan dinas, Pendampingan Epantau	Sub kegiatan baru
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	2	laporan	5.773.888.961	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	24	laporan	9.462.672.445		
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	orang/bulan	5.644.691.162	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	orang/bulan	9.062.672.445	Gaji dan Tunjangan ASN	

5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu l anan/Semester a n SKPD	1	laporan	129.197.799	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri w ulanan/Seme s teran SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme s teran SKPD	2	laporan	400.000.000	Honor PA,KPA, PPK, BP, BPP dan Penyusuna n LK SKPD, Rapat Kerja Keuangan	

3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	2	Laporan	30.845.916	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	4	Laporan	250.000.000,00		
6	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	30.845.916	6	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	laporan	250.000.000	Laporan BMD, inventaris aset, rapat kerja urusan BMD, Rekon BMD	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	70.000.000	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	800.000.000,00		
7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20	orang	70.000.000	7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40	orang	300.000.000	Sosialisasi, Workshop dan Inovasi	

8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		orang		8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	orang	500.000.000	Bimtek arsip, bimtek manajemen pelayanan dan RB, bimtek IT / Statistik, bimtek perencanaan, bimtek program keuangan,	Sub kegiatan baru

5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	Layanan	289.500.000	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	Layanan	1.800.000.000,00		
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	60.000.000	9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	150.000.000	Alat Tulis Kantor	
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	paket	5.000.000	10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	paket	200.000.000	Makan minum rapat dan peralatan rumah tangga	
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	8.500.000	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	200.000.000	Kalender, Map, Souvenir, Marchandise	

12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	dokumen	9.000.000	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	dokumen	50.000.000	Kalender, Map, Souvenir, Marchandise	

13	Penyediaan Bahan /Material	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		paket		13	Penyediaan Bahan /Material	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	paket	300.000.000	Pameran Merah Putih, Erau dll (homestay, sewa stand, design pameran, makan minum pameran, doorprize)	Sub kegiatan baru
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	laporan	50.000.000	14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	laporan	150.000.000	Makan Minum Tamu	
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	117.000.000	15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	500.000.000	Fasilitasi Kadis, Sekretaris, Kabid, Kasubag,, JF, ASN	
16	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	dokumen	40.000.000	16	Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	dokumen	250.000.000	Tata kelola arsip	

6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	3	Layanan	79.674.000	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	27	unit	3.100.000.000,00		
17	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	unit	-	17	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	500.000.000	Pembangunan pagar UPT	

18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	unit	-		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30	unit	300.000.000	Meubeleir	
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	unit	79.674.000	18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	unit	300.000.000	Komputer , Printer, Laptop	
20	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah unit kendaraan bermotor penumpang yang Disediakan		unit		19	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah unit kendaraan bermotor penumpang yang Disediakan	16	unit	2.000.000.000	Kendaraan dinas mobil kabid dan mobil pelayanan serta mobil angkut pickup, sepeda motor	

7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3	Layanan	511.428.636	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3	Laporan	2.250.000.000,00		
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	75.040.000	20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	350.000.000	Listrik dan Wifi MPPA	

21	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	laporan	40.000.000	21	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	laporan	100.000.000	Perawatan peralatan komputer, AC, sound system, printer, mesin foto copy dll	
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	396.388.636	22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	1.800.000.000	hnorarium THL, tenaga ahli progremer, statistik, IT, Jurnalis, CS, Satpam, Psikolog Klinis, Konselor	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3	Layanan	95.000.000,00	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	37	unit	1.950.000.000,00		

23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28	unit	72.964.000	23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yg Dipelihara dan dibayrkan Pajaknya	30	unit	300.000.000	Perbaikan Kendaraan Dinas	
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprsionl atau Lapangan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	unit	22.036.000	24	Penyediaan Jasa Pemliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprsl atau Lapang	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayrkan Pajak dan Perizinannya	4	unit	150.000.000	Perbaikan Kendaraan Dinas Oprasional dan Pajak Kendaraan	

25	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	1	unit		25	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	3	unit	1.500.000.000	Rehab gedung serba guna, untuk forum anak dan satgas PPA (ex gedung BKKBN)	
II	PROGRAM PENGARUSUT AMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab.Kutai Kartanegara	Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum,Sosial, Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	16,10	Persen	550.000.000	II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab.Kutai Kartanegara	Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum,Sosial, Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	16,10	Persen	3.000.000.000		
9	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Pelembagaan Pengarusutama an Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2	dokumen	75.000.000	9	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Pelembagaan Pengarusutam aan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Ko ta	25	dokumen	950.000.000		

26	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen	-	26	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustama an Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Ko ta	1	Dokumen	250.000.000	Pelaksanaan penyusunan RAD PUG (Lokus Tenggarong)	kolobora si

27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustama an Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Ko ta	2	Dokumen	250.000.000	Pembentuka n tim Pokja PUG kab. Kukar berdasarkan SK Bupati.	kolaborasi
28	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah SDM yangmemperole h advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG		orang		28	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggara an PUG	40	orang	250.000.000	Pendamping an penyusunan PPRG (GBS dan GAP)	kolaborasi
29	Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	20	orang	75.000.000	29	Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggara an PUG tingkat Kab/Kota	40	orang	200.000.000	Sosialisasi peraturan perundanga n-undangan tentang PUG (Lokus samarinda dan	

														balikpapan)	
10	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah organisasi Perempuan yang bergerak dlm bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi tingkat kabupaten/kota	8	Organisasi	475.000.000	10	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah organisasi Perempuan yang bergerak dlm bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi tingkat kabupaten/kot a	160	Organisasi	700.000.000		

30	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	350.000.000	30	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	350.000.000	Sosialisasi peraturan perundanga n untuk peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang polhum dan sosek.	
31	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan	10	Organisasi	125.000.000	31	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	28	Organisasi	350.000.000	Rakor lembaga/org anisasi perempuan kab. Kukar.	

			Kabupaten/Kota					Ekonomi		Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	10	Lembaga	-		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	80	Lembaga	1.350.000.000		

32	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	0	Lembaga	-	32	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	40	Orang	500.000.000	Pelatihan tata kelola layanan pemberdaya an perempuan. (Lokus Tenggarong)	
33	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	0	Orang		33	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	28	Lembaga	700.000.000	Advokasi kebijakan dan pendamping an serta fasilitasi kegiatan organisasi perempuan. (Lokus tersebar)	

34	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	0	Dokumen	-	34	Pengembanga n Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	Dokumen	150.000.000	Pemberitaan kegiatan pemberdaya an perempuan (video, medsos, banner, leaflet. Baliho)	
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100,000	persen	100.000.000	III	PROGRAM PERLINDUN G AN PEREMPUAN	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	persen	2.200.000.000		

11	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pencegahan kekerasan terhadap perempuan	1	dokumen	-	11	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pencegahan kekerasan terhadap perempuan	10	dokumen	700.000.000		
35	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	dokumen	-	35	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	dokumen	400.000.000	1. Rakor pembentuka n satgas PPA kekerasan terhadap perempuan. (Lokus kab. kukar) 2. Monev pelaksanaan program kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	kolaborasi

36	Advokasi Kebijakan dan Pendampinga n Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/K o ta	Kab.Kutai Kartanegar a	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kot a	0	perangkat daerah		36	Advokasi Kebijakan dan Pendampinga n Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/K ota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampinga n Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/K o ta	11	perangkat daerah	300.000.000	1. Advokasi kebijakan tentang penyusuna n perda perlindung a n perempuan kab kukar 2. Advokasi pendampin g an layanan perlindung a n perempuan pada perangkat daerah terkait	

12	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi	20	orang	-	12	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi	6	Layanan	700.000.000		
37	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	0	orang		37	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Ko ta yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	50	orang	500.000.000	penjangkaua n korban, visum, Biaya pengobatan dan perawatan rawat inap dan rawat jalan dan akomodasi korban /makan dan minum korban	

38	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	layanan		38	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6	layanan	200.000.000	Layanan tindak lanjut pengaduan kasus Perempuan Ke Luar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (rujukan ke RSUD provinsi, pengantaran korban ke luar daerah)	

13	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	1	dokumen	100.000.000	13	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	6	Layanan	800.000.000		
39	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	laporan	-	39	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	1	laporan	200.000.000	Advokasi fasilitasi sapras bagi penyediaan layanan perempuan korban kekerasan kab. Kukar	

40	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30	orang	100.000.000	40	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Ko ta yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	60	orang	300.000.000	Pelatihan/ Bi mtek manajemen penanganan kasus bagi SDM, ASN, UPT P2TP2A, Tenaga Teknis profesional pada DP3A. (Lokus Samarinda / Balikpapan)	

41	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	0	orang	-	41	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	50	orang	50.000.000	Fasilitasi pembelian kebutuhan khusus perempuan (Lokus Kab. Kukar)	
42	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	dokumen	-	42	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	dokumen	250.000.000	Bimtek lembaga layanan perlindung a n perempuan Dharma wanita, PKK, GOW dll (Lokus Samarinda)	

IV	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga yang terbentuk dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	50	persen	100.000.000	IV	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga yang terbentuk dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	50,00	persen	1.600.000.000		
14	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak			-	14	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	5	dokumen	550.000.000		

43	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Perangkat Daerah	-	43	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Lembaga	200.000.000	PKS dengan 5 perangkat daerah (Lokus 3 OPD dan 2 kecamatan)	
44	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	0	Dokumen	-	44	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4	Dokumen	150.000.000	Pembuatan media promosi kualitas keluarga (spanduk, pamplet, media siaran, brosur) lokasi tersebar	

45	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Laporan	-	45	Pengembanga n Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Laporan	200.000.000	Puspaga dalam rangka kampanye perubahan perilaku percepatan penurunan stunting (Lokus Kab. Kukar)	kemiskinan dan stunting

15	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	20	orang	100.000.000	15	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	16,67	orang	1.050.000.000		
46	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan	0	Lembaga		46	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembanga n Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat	4	Lembaga	300.000.000	Advokasi kebijakan dan pendamping an lembaga - lembaga non formal seperti LKSA, LK3, Lembaga - lembaga	

	Daerah Kabupaten/Ko ta		Pendampingan					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Advokasi dan Pendampingan				Keagamaan (Lokus Kab. Kukar)	

47	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Orang		47	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Ko ta	50	Orang	400.000.000	Pelatihan peningkatan kualitas keluarga untuk menurunkan kemiskinan dan stunting (Pelatihan pijat refleksi untuk perempuan kepala keluarga) Lokus Samboja dan Tenggarong seberang	

48	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100.000.000	48	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	350.000.000	Pelatihan tata kelola layanan peningkatan kualitas keluarga (Lokus tersebar di kukar)	
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten	81,03	persen	80.718.362	V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten	81,03	persen	250.000.000		
16	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam	3	dokumen	80.718.362	16	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam	3,00	dokumen	250.000.000		

	Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kelembagaan Data					Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Kelembagaan Data					
49	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	0	Dokumen	-	49	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Ko ta yang Tersedia	1	Dokumen	150.000.000	Penyediaan data gender dan anak kab. Kukar	kolo bora si
50	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	80.718.362	50	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Ko ta	1	Dokumen	100.000.000	Rakor / Seminar penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak kab. Kukar.	
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab.Kutai Kartanegara	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	780	Nilai	215.000.000	VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab.Kutai Kartanegara	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	780	Nilai	1.285.000.000		

17	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah organisasi pelembagaan pemenuhan hak anak yang terbentuk	10	Lembaga	100.000.000	17	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah organisasi pelembagaan pemenuhan hak anak yang terbentuk	4	Lembaga	400.000.000		

51	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	0	Organisasi	-	51	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30	Organisasi	250.000.000	Pelatihan konvensi hak anak lokus tersebar dan berdasarkan SK Kadisdik dan Kadinkes dan Target 20 Organisasi / 40 Orang Peserta (20 Sekolah Ramah Anak dan 20 Puskesmas Ramah Anak)	kolaborasi
52	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan	1	Dokumen	100.000.000	52	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan	2	Dokumen	150.000.000	Pembinaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak berdasarkan SK Bupati	

	Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota		Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				Kukar (Perubahan SK dan Laporan Kegiatan)	
18	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan PHA	50	orang	115.000.000	18	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan PHA	5	orang	885.000.000		

53	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Anak/ Orang		53	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	300	Anak/Orang	250.000.000	Peringatan Hari Anak Nasional dan Jambore Forum Anak (Lokus Tenggarong)	
54	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	115.000.000	54	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	150.000.000	Perpustakaan ramah anak, pusat informasi sahabat anak yang akan distandarisi (Lokus tersebar, sesuai surat keputusan kadisdik dan kadispur)	

55	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Dokumen	-	55	Pengembanga n Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewngan Kabupaten /Kota	4	Dokumen	185.000.000	Pembuatan media promosi pemenuhan hak anak (spanduk, pamplet, media siaran, brosur) lokasi tersebar	

56	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Dokumen		56	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7	Dokumen	300.000.000	Pembentuka n forum anak tingkat kecamatan dan kelurahan dasar intruksi bupati kukar tahun 2023 (Lokus 6 kecamatan dan 1 kelurahan)	
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100,00	persen	215.000.000	VII	PROGRAM PERLINDUNG AN KHUSUS ANAK	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	persen	3.250.000.000		
19	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan	11	perangkat daerah	-	19	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak	11	perangkat daerah	800.000.000		

	Daerah Kabupaten/Kota		para pihak Lingkup Daerah					Daerah Kabupaten/ Kota		Lingkup Daerah					

57	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kot a layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu	0	Kegiatan		57	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu	2	Kegiatan	500.000.000	1. Penyusunan PKS dg instansi kab/kota serta monitoring dan Evaluasi PKS yg sdh ada dg kab/kota (Lokus Samarinda, Balikpapan, PPU, Kutin, Kubar, Bontang, RSJ Samarinda, RS Abdoel Moeis) 2. DRPPA percontohan di 10 desa berdasarkan zonasi di	Kolaborasi antar bidang

														kab. Kukar	
58	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	0	orang		58	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	30	orang	300.000.000	1. Pencegahan KTA di kecamatan (Sekolah SMA-SMP) 2. Sosialisasi siswa-siswi untuk wilyah tenggarong	

20	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindunga khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota	40	Layanan	100.000.000	20	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindunga khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Ko ta	90	Layanan	1.600.000.000		
59	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	0	orang		59	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	100	orang	1.000.000.000	penjangkaua n korban, visum, Biaya pengobatan dan perawatan rawat inap dan rawat jalan dan akomodasi korban /makan dan minum korban	

60	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	6	Layanan	100.000.000	60	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	25	Layanan	250.000.000	Layanan tindak lanjut pengaduan kasus anak Ke Luar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (rujukan ke RSUD provinsi, pengantaran korban ke luar daerah)	

61	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan K husus Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Dokumen	-	61	Pengembanga n Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Ko ta	1	Dokumen	250.000.000	Brosur dan spanduk Rp.50,000,0 00 dan Usulan Aspirasi Masy Rp.200.000,000 untuk Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan	kolaborasi
62	Penguatan Jejaring antar Lembaga PenyediaLayan an Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Dokumen	-	62	Penguatan Jejaring antar Lembaga PenyediaLayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Ko ta	1	Dokumen	100.000.000	Satgas PPA	

21	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	dokumen	115.000.000	21	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25	dokumen	850.000.000		

64	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	0	Lembaga	-	63	Pengembanga n Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	16	Lembaga	250.000.000	Lembaga Konsultasi Kesejahteraa n Anak (LKSA)	
65	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kot a	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1	Kegiatan	115.000.000	64	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2	Kegiatan	300.000.000	1. Pembentuka n PPATBM di 10 desa dan kelurahan 2. Kaji Tiru PPTABM, Dinkes, Dinsos, Kepolisian, Kejaksaan, DP3A	

66	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Kabupaten/Ko ta	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	0	orang		65	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	50	orang	300.000.000	Pelatihan/ Bi mtek manajemen penanganan kasus bagi PPABM di 20 desa dan kelurahan serta lembaga terkait pelaksanaan di samarinda / balikpapan	
				Jumlah		8.286.055.875					Jumlah		31.847.672.445		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pengembangan (Musrenbang) Desa ataupun Musrenbang Kecamatan terdapat usulan dari masyarakat yang berhubungan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, dan dimana di dalam Rapat Forum Perangkat Daerah di masing-masing Perangkat Daerah usulan masyarakat tersebut telah diakomodir oleh OPD diantaranya :

Nama Perangkat Daerah :

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	Fasilitasi Sarana Prasarana Desa	Perlu adanya Penyediaan Layanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Desa Loa Duri Ulu	Penuatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	30 orang	Pelatihan dan Sosialisasi penguatan jejaring penyedia layanan perlindungan bagi AMPK diDesa, Loa Duri Ulu Kec Loa Janan, peserta 30 orang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Melalui Strategi Nasional (STRANAS) Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender (PPRG), berdasarkan permasalahan, sasaran, serta arah Kebijakan Nasional, maka strategi PPRG meliputi strategi umum dan strategi khusus. Strategi umum mengacu pada dua permasalahan yang dihadapi adalah penerapan PPRG di tingkat Nasional dan daerah yaitu :

a. Penguatan Dasar Hukum
b. Penguatan koordinasi baik antar sesama Instansi Penggerak maupun antar Penggerak dengan Instansi Pelaksana.

Strategi khusus berupa penjabaran dari strategi umum yaitu penguatan koordinasi melalui serangkaian strategi khusus yang diklasifikasikan menurut tahapan manajemen pembangunan, dari perencanaan hingga evaluasi.

Belum efektifnya kelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan antara lain dapat dilihat :

1) Belum optimalnya dukungan politik terhadap Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagai Prioritas Pembangunan
2) Belum memadainya kelembagaan dalam pelaksanaan PUG terutama sumber daya manusia serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan.
3) Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep Isu Gender serta manfaat PUG dalam pembangunan.

Masalah lainnya adalah belum tersedianya data terpilah sehingga sulit dalam menemu-kenali masalah-masalah gender yang ada. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan. Kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan.

Lambatnya peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) setiap tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesenjangan gender di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, politik serta pengambilan keputusan yang signifikan yang antara lain disebabkan oleh :

1) Masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya pada tataran Kabupaten/Kota,
2) Rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang Politik, Jabatan Publik dan di Bidang Ekonomi,
3) Rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial serta terjadinya penyakit.
4) Penyusunan data terpilah belum dilakukan oleh semua sektor / OPD, belum tersedianya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin sehingga sulit dalam menemu-kenali masalah-masalah gender yang ada. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Pentingnya data terpilah, mengidentifikasi masalah dan dapat dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial, ekonomi, waktu, yang dalam analisisnya menggunakan Analisa Gender. Bentuk data terpilah bisa kuantitatif atau kualitatif, dari data terpilah dapat diketahui posisi dan kondisi kebutuhan masyarakat laki-laki dan perempuan dalam pembangunan dan permasalahannya dengan mengurangi kesenjangaan gender :
    a. Pemetaan kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam perumusan perencanaan program dan kegiatan;
    b. Dapat lebih mudah menentukan intervensi yang tepat pada masing-masing kebutuhan sekaligus mengalokasikan anggaran yang tepat sasaran sesuai kebutuhan dalam *Gender Budget Statement (GBS)*;
    c. Akan mempermudah dalam proses monitoring dan evaluasi, karena data terpilah dan perencanaan serta analisa gendernya jika sudah tersedia, akan mudah membandingkannya dengan kondisi setelah diintervensi.

Tantangan dan permasalahan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semakin bertambah berat dan kompleks. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat menjadi sangat penting dan menentukan keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor penghambat yang

dapat menjadi penghalang pencapaian tujuan atau sasaran. Diperlukan kerja keras dan upaya yang serius agar target tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai. Berikut ini akan diuraikan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DINAS PP & PA ditinjau dari sasaran jangka menengah RENSTRA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ataupun RENSTRA DINAS PP & PA Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu berfokus pada upaya peningkatan jumlah pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan yang Responsif Gender di Bidang Ekonomi, Politik, Sosial dan Keamanan, kemudian memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak serta memperhatikan tumbuh kembang anak.

Beberapa faktor penghambat yang dihadapi di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pencapaian sasaran di atas antara lain :

a. Diskriminasi dari pemberi pekerjaan terhadap tenaga kerja perempuan;
b. Tingkat kompetitif perempuan yang rendah ;
c. Kurangnya pemahaman pihak-pihak terkait/ stakeholder mengenai PUG;
d. Rendahnya tingkat pendidikan;
e. Kurangnya akses pendidikan bagi perempuan;
f. Kurangnya kesempatan perempuan berpartisipasi dalam pembangunan;
g. Belum adanya sistem layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
h. Budaya *patriarckhi* di masyarakat;
i. Kurangnya komitmen kepala daerah dan sinergitas lintas sektor;
j. Kurangnya koordinasi dan sinergitas kegiatan LSM/LM, ORMAS pemerhati perempuan dan anak;
k. Kebijakan daerah belum *responsive gender;*
l. Data Terpilah belum dilakukan oleh semua sektor / SKPD; dan
m. Belum didukung oleh kualitas dan kuantitas tenaga yang handal.

Namun demikian terdapat kondisi yang merupakan faktor pendorong pelayanan Dinas PP PA Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan dapat mendorong pencapaian sasaran tersebut. Beberapa faktor pendorong diantaranya adalah:

a) Masih terbukanya kesempatan kerja yang luas;
b) Telah adanya regulasi yang *responsive gender*;
c) Telah adanya program pengentasan kemiskinan;
d) Telah adanya Komitmen Kepala Daerah mengenai PUG;
e) Telah adanya Regulasi terkait Perlindungan Perempuan dan Anak;
f) Telah adanya Komitmen Pemerintah Pusat dan Provinsi tentang KLA;

Di Bidang Partisipasi Anak telah diterbitkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak, dan 2 (dua) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Forum Anak, sampai dengan Tahun 2016 terbentuk FORUM Anak di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa se Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu bentuk wadah partisipasi anak. Partisipasi anak dalam peroses perencanaan pembangunan sudah dilibatkan baik ditingkat Nasional maupun di daerah. Di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara sejak Tahun 2013 melibatkan Forum Anak dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Selain itu Kementerian PPPA juga mengikutsertakan Forum Anak Daerah dalam Konferensi Tingkat Asia yang di laksanakan di Kota Solo, yang membahas tentang partisipasi anak dan Kabupaten / Kota Layak Anak, serta seleksi anak berbakat melalui Tunas Muda Pemimpin Indonesia (TMPI) di Tingkat Provinsi KALTIM.

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) belum tertangani dengan baik dikarenakan belum adanya koordinasi yang baik antara lintas OPD sehingga mempersulit penanganannya terutama yang ada di wilayah kecamatan, dan terbatasnya pengetahuan orang tua/keluarga yang memiliki ABK terhadap anaknya sehingga malu dan menyembunyikan/menjauhkan anak dari masyarakat sehingga

pemenuhan hak ABK menjadi terhambat dan tidak optimal. Disamping itu jumlah guru disekolah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menangani ABK masih sangat terbatas, sehingga banyak tidak dapat bersekolah di sekolah umum Inklusi. Data ABK dari SLB tahun 2014 berjumlah 111 orang dan di tahun 2015 berjumlah 125 Orang. Ini menunjukan anak penyandang disabilitas dari seluruh anak di Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahun meningkat.

Permasalahan sosial anak mencakup area yg cukup luas dan merupakan isu lintas sektoral, antara lain yang mengalami eksploitasi secara ekonomi (pekerja anak). Anak

korban penyalah gunaan narkotika yang dibina dikalapas KelasII B Tenggarong pada tahun 2014 berjumlah 22 orang dan tahun 2015 sebanyak 15 orang. Yang perlu diperhatikan lagi yaitu zat adiktif lainya diantaranya anak menghisap lem semakin marak dan meresahkan masyarakat hampir disetiap Kecamatan,di Kabupaten Kutai Kartanegara ada anak yang melakukan hal tersebut. Perkawinan usia anak masih banyak terutama di desa-desa terpencil. Masalah sosial yang dialami oleh anak pada umumnya berasal dari keluarga miskin yang tidak bisa memberikan pengasuhan secara baik dan keluarga yang tidak utuh (brokend home).

Capaian pembangunan anak, kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak difokuskan pada 3 (tiga) hal yaitu : pencegahan, pelayanan dan penanganan masalah yang dihadapi anak. Prinsip – prinsip yang harus selalu diterapkan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah :

a. Non – Diskriminasi : yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, agama,paham politik,asal kebangsaan suku, status ekonomi, kondisi fisik anak, atau faktor lainya.
b. Kepentingan terbaik untuk anak yaitu mengupayakan semua keputusan kegiatan dan dukungan dari para pihak yang berpengaruh semata mata untuk kepentingan terbaik untuk anak.
c. Mengutamakan hak anak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, yaitu kegiatan yang disusun untuk

meningkatkan perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan sifat perkembangannya.

d. Menghormati pandangan anak ,yaitu memperhatikan dan memasukkan pandangan dan kebutuhan anak dalam setiap proses pembahasan dan pengembalian keputusan setiap kegiatan.

Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, capaian ditandai dengan terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya.

Upaya percepatan pemilikan akte kelahiran dilakukan melalui penetapan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada 24 Desember 2013. MoU delapan menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akte Kelahiran.

Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABDH) dengan diterapkannya undang- undang no 11 tahun 2012 tentang peradilan anak maka anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan rehabilitasi (anak ini diberikan hak-haknya terutama untuk memperoleh pendidikan walaupun berhadapan dengan hukum).

Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjuk langsung oleh Presiden RI melalui Kementerian PP PA RI pada Tahun 2006 bersama 4 (empat) Kabupaten/Kota menjadi KABUPATEN MENUJU KOTA LAYAK ANAK (Sidoarjo, Gorontalo, Jambi, Solo, dan Kutai Kartanegara) dengan Pendukung PERDA NO 9 Tahun 2004 Tentang ZONA BEBAS PEKERJA ANAK. Pada Tahun 2013 Presiden RI melalui Kementerian PP PA menunjuk Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu dari 5 Kabupaten / Kota di Indonesia untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI nomor 56 Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang Penunjukan & Penetapan Kabupaten/Kota Yang Mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak bersama 5 daerah Kabupaten /Kota lainnya menganugrahkan KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA sebagai KABUPATEN KOTA LAYAK ANAK di Tingkat PRATAMA dari 37 Kabupaten/Kota se

Indonesia. Untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara, di pandang perlu adanya :

1. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 334/ SK – Bup/ HK/ 2012 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Pengembangan Layak Anak (KLA).
2. Instruksi Bupati Kutai Kartanegara nomor 1 Tahun 2012 tentang pengembangan Program dan Anggaran terhadap percepatan Kutai Kartanegara sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) bagi setiap OPD sesuai dengan Indikator dan Tupoksi OPD Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Instruksi Bupati Kutai Kartanegara nomor 2 Tahun 2012 tentang PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KECAMATAN DAN KELURAHAN / DESA Penbentukan
4. Bahkan Anak berhadapan dengan hukum harus melanjutkan sekolah dari tingkat SD/ SLTP / MTS / Pesantren / SLTA / dan Perguruan Tinggi di fasilitasi oleh TIM KOORDINASI PENANGANAN MASALAH SOSIAL PEREMPUAN DAN ANAK DI TK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. Dalam rangka memenuhi hak dan melindungi anak di lembaga pendidikan, pada tahun 2014 KEMEN PPPA menggagas tersusunya Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) bersama 9 (Sembilan) K / L terkait (Kementerian PPPA RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPN, dan BPOM), lembaga masyarakat, lembaga Internasional, lembaga pemerhati anak dan pakar anak.

Kabupaten/kota layak anak adalah sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak & perlindungan anak. Alasan mengapa Kabupaten/Kota Layak Anak perlu dilaksanakan karena:

a. Anak adalah amanah Tuhan yang perlu dipertanggungjawabkan secara pribadi dan sosial;
b. Jumlah anak 30 - 36% dari total penduduk , tidak bisa diabaikan;
c. Perubahan global mengancam tata nilai agama, sosial, dan budaya lokal;

d. Embrio SDM yang handal dan tangguh menentukan masa depan bangsa dan negara; dan
e. Anak terancam menjadi korban kekerasan, pelecehan, dikriminasi, perlakuan salah.

Pengembangan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak yang belum menyeluruh, yang mana Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2013 telah mendapat penghargaan pada tingkat Pratama dengan adanya penghargaan ini diharapkan kepada seluruh SKPD terkait untuk dapat mengintergrasikan kedalam program SKPD masing-masing sesuai dengan tupoksinya.

Di Bidang Pemenuhan hak Kesehatan Anak, Kementrian PPPA RI bersama tiga Kementrian terkait (Kementrian PPPA RI, Kementrian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri) telah mendorong terbentuknya Puskesmas Ramah Anak (PRA) dalam rangka mengurangi kesakitan pada anak sampai dengan tahun 2016 di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 1 PUSKEMAS yang menginisiasi menuju Puskesmas Ramah Anak yaitu Puskesmas Rapak Mahang. Upaya pemenuhan hak kesehatan anak lainnya seperti penurunan angka kematian bayi (ABK) di bulan Januari s/d Agustus Tahun 2016 berjumlah 90 Orang dan Angka Kematian Bayi dan Anak (AKBK), hasil survey PSG balita Kabupaten Kutai Kartanrgara Tahun 2015 status Kekurangan GIZI 22,67% se Kabupaten Kutai Kartanegara. Peningkatan ketersediaan air bersih Tahun 2015 daerah perkotaan sebanyak 80% dan daerah pedesaan 60 % dari jumlah penduduk Kutai Kartanegara.

Di bidang lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur, telah dilakukan beberapa upaya seperti mendorong tersedianya Rute Aman Sekolah ke / dari Sekolah (RASS) terkait (DPPA,Perhubungan,Ciptakarya, Dikbud, Kementrian Agama dan POLRES KUKAR) selain itu juga dilakukan sosialisasi, KIE, dan pelatihan kepada FORUM ANAK di Tingkat kabupaten dan di tingkat kecamatan dalam upaya penanaman wawasan kebangsaan dan cinta tanah air . Dalam upaya mendukung penciptaan infrastruktur yang ramah anak juga telah diinisiasi Penyusunan Rancangan Kebijakan Ruang BERMAIN RAMAH ANAK. Dalam rangka Meningkatkan peran PERLINDUNGAN ANAK, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak telah mengeluarkan PERDA NO 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dapat dijadikan acuan bagi PEMDA dalam mendorong peningkatan partisipasi dan kualitas hidup anak di segala bidang dalam rangka melindungi anak dari tindak kekerasan, exploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Maksud dari dibuatnya Rencana kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara Periode 2016-2021. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2023.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi Misi Pemerintah Daerah.
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas PP dan PA dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu terarah dan terukur.
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 tahun.
4. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dinas PP & PA Kabupaten Kutai Kartanegara berusaha memberikan pelayanan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan visi, misi dan program bupati dan wakil bupati. Dalam upaya pemberian layanan pada masyarakat masih terdapat permasalahan yang disebabkan adanya faktor penghambat. Namun demikian terdapat faktor pendorong yang berkontribusi positif dalam perbaikan layanan, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

No.	Visi	Misi	Masalah	Akar Masalah	Alternatif Pemecahan Masalah	Program
1	2	3	4	5	6	7
	Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya	Masih tingginya korban kekerasan terhadap perempuan perempuan dan anak danbelum didampingi seluruhnya oleh tenaga terlatih	Belum memiliki pendamping korban tingkat kecamatan/desa	Membentuk kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
				Kurangnya pemahaman masyarakat dampak dari kekerasan pada perempuan dan anak	Memberikan pemahaman ke masyarakat tentang kekerasan dan dampak dari kekerasan pada perempuan dan anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

No.	Visi	Misi	Masalah	Akar Masalah	Alternatif Pemecahan Masalah	Program
1	2	3	4	5	6	7
			Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap hak- hak anak	Para pengambil kebijakan belum banyak membuat kebijakan yang responsif anak	Mendorong stakeholder untuk responsif terhadap pemenuhan hak anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
						Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
						Program Pemenuhan Hak-Hak Anak
			Kelembagaan PUG di OPD belum Optimal	Masih Banyak ASN yang Belum Memahami Tentang PUG	Fasilitasi dan advokasi kepada OPD beserta seluruh ASN didalamnya untuk implementasi PUG	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
			Rendahnya Angka IPG dan IDG	Belum Optimalnya OPD yang terkait Dengan IPG dan IDG	Sinkronisasi dan Penguatan Indikator Variabel IPG dan IDG oleh Masing Masing OPD Terkait	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
			Belum terujudnya keadilan dan kesetaraan Gender (KKG) secara maaksimal	Rendahnya Pratisipasi terhadap Pembangunan Kesetaraan Gender	Mempercepat Implementasi PUG dan Memperkuat Peran Perempuan dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
			Implementasi Kebijakan masih belum Optimal	Konsitensi terhadap pelaksanaan kebijakan maseh kurang	Memperkuat dan Mempertajam pelaksanaan kebijakan terhadap peran,kedudukan dan fungsi pemberdayaan pp dan anak	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

			Kurangnya perempuan sebagai pelaku ekonomi	Akses pp dalam mendapatkan informasi usaha masih sulit.2.Kurangnya permodalan usaha.3.Rendahn ya kualitas SDM	Memberikan akses Informasi dan kesempatan seluas luasnya bagi perempuan untuk memperoleh bantuan modal serta memberikan bimbingan manajemen usaha	Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi, maka kegiatan pada Dinas PP dan PA Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 mengalami perubahan baik dari jumlah kegiatan dan rencana pagu dana. Adapun jumlah kegiatan dalam tahun 2023 adalah sebanyak 22 Kegiatan dan 7 Program.

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Renstra Kementerian dan Provinsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada perubahan terhadap indikator program :

No	Program/Pembangunan	Indikator	Cara Hitung
1.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam Jabatan	Jumlah keterwakilan perempuan dalam jabatan dibagi jumlah jabatan dikali 100
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten	Jumlah PD yang memiliki data gender dibagi jumlah PD dikali 100
3.	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah Perempuan mengalami kekerasan dibagi Jumlah Penduduk Perempuan x100

No	Program/Pembangunan	Indikator	Cara Hitung
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah Anak (Penduduk Usia Kurang dari 18 Tahun korban kekerasan yang ditangani Instansi tingkat Ka/Kota yang didampingi dibagi jumlah Anak (Penduduk Usia Kurang dari 18 Tahun) x 100%
5.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten Layak Anak	Jumlah kecamatan yang menginisiasi KLA dibagi dengan jumlah kecamatan x 100
6.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	

c. Rumusan Program dan Kegiatan tidak Sesuai dengan Rancangan awal

Dalam melakukan perumusan Program dan kegiatan sejauh ini masih sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, Akan tetapi dari penetapan pagu Indikatif terdapat ada beberapa perubahan dalam penyusunan renja Tahun 2025, yaitu adanya Mall Pelayanan Perempuan dan Anak (MPPA) yang saat ini sedang dalam proses louncing sebagai bentuk pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada masyarakat yang memerlukan perlindungan terhadap Perempuan dan anak.

d. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	8	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah		76,5 Persen	8.537.613.313,00	APBD		76,6 Persen	7.025.337.513,00
2	8	1	2			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Dokumen	1.000.000.000,00	APBD		6 Dokumen	175.000.000,00

2	8	1	2	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	3 dokumen	450.000.000,00	APBD	Rapat kerja penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA/DPA	3 dokumen	100.000.000,00
2	8	1	2	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	3 laporan	50.000.000,00	APBD	Musrenbang, pendampingan SPIP, LKJiP, LPPD, Sakip, Rakor DPPA	3 laporan	75.000.000,00

2	8	1	2	7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	1 laporan	150.000.000,00	APBD	Monev kegiatan dinas, Pendampingan Epantau	1 laporan	0
2	8	1	2	8		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	1 dokumen	50.000.000,00	APBD		1 dokumen	0
2	8	1	2	9		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	1 data	250.000.000,00	APBD		1 data	0
2	8	1	2	10		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	1 berita acara	50.000.000,00	APBD		1 berita acara	0
2	8	1	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		2 Dokumen	6.387.010.677,00	APBD		2 Dokumen	5.774.043.003,00
2	8	1	2	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Kutai Kartanegara	40 orang/ bulan	6.387.010.677,00	APBD	Gaji ASN, TPP	40 orang/ bulan	5.644.845.204,00
2	8	1	2	5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Kab.Kutai Kartanegara	1 laporan	25.000.000,00	APBD	Laporan LKPD	1 laporan	129.197.799,00

							Keuangan Akhir Tahun SKPD							
2	8	1	2	7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	2 laporan	129.197.799,00	APBD	Honor PA, KPA, PPK, bendahara pengeluaran, LK, Manajemen RTP, rapat kerja keuangan	2 laporan	0
2	8	1	2	8		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab.Kutai Kartanegara	1 dokumen	25.000.000,00	APBD			
2	8	1	2			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		1 Laporan	105.000.000,00	APBD		1 Laporan	50.000.000,00
2	8	1	2	1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	2 laporan	25.000.000,00	APBD		2 laporan	0
2	8	1	2	3		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	1 laporan	50.000.000,00	APBD		1 laporan	50.000.000,00

2	8	1	2	5		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	1 laporan	30.000.000,00	APBD	Laporan BMD, inventaris aset, rapat kerja urusan BMD, Rekon BMD	1 laporan	0
2	8	1	2			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian		2 Layanan	70.000.000,00	APBD	70.000.000,00	2 Layanan	55.500.000,00
2	8	1	2	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab.Kutai Kartanegara	20 orang	70.000.000,00	APBD	Sosialisasi peraturan perundangan PPA dan peraturan perundangan lainnya	20 orang	55.500.000,00
2	8	1	2	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab.Kutai Kartanegara	40 orang	0	APBD	Bimtek arsip, bimtek manajemen pelayanan dan RB, bimtek IT / Statistik, bimtek perencanaan, bimtek program keuangan, bimtek manajemen resiko, bimtek SPIP, bimtek e-kin, bimtek PPTK, bimtek RTP, bimtek SDI/becik, bimtek barang dan jasa	40 orang	0

2	8	1	2			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah		7 Layanan	289.500.000,00	APBD		7 Layanan	289.500.000,00
2	8	1	2	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	1 paket	60.000.000,00	APBD	Alat Tulis Kantor	1 paket	60.000.000,00
2	8	1	2	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	1 paket	5.000.000,00	APBD	Makan minum rapat dan peralatan rumah tangga	1 paket	5.000.000,00
2	8	1	2	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	1 paket	8.500.000,00	APBD	Kalender, Map, Souvenir, Marchandise	1 paket	8.500.000,00
2	8	1	2	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	1 dokumen	9.000.000,00	APBD	Perpustakaan anak dan perempuan, pojok baca	1 dokumen	9.000.000,00

2	8	1	2	7		Penyediaan Bahan /Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	1 paket	0	APBD	Pameran Merah Putih, Erau dll (homestay, sewa stand, design pameran, makan minum pameran, doorprize)	1 paket	0
2	8	1	2	8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Kutai Kartanegara	1 laporan	50.000.000,00	APBD		1 laporan	50.000.000,00
2	8	1	2	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	1 laporan	117.000.000,00	APBD	Fasilitasi Kadis, Sekretaris, Kabid, Kasubag, ASN, JF	1 laporan	117.000.000,00
2	8	1	2	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	1 dokumen	40.000.000,00	APBD	Tata kelola arsip	1 dokumen	40.000.000,00
2	8	1	2			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah		67 Unit	79.674.000,00	APBD		51 Unit	75.000.000,00
2	8	1	2	9		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	1 unit	0	APBD	Pembangunan pagar UPT	1 unit	50.000.000,00
2	8	1	2	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	30 unit	79.674.000,00	APBD	Mebeuleir	30 unit	25.000.000,00
2	8	1	2	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Kutai Kartanegara	20 unit	0	APBD	Komputer, Printer, Laptop	20 unit	0

						Bangunan Lainnya	yang Disediakan							
2	8	1	2	2		Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional	Jumlah unit kendaraan bermotor penumpang yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	16 unit	0	APBD	Kendaraan dinas mobil kabid dan mobil pelayanan serta mobil angkut pickup, sepeda motor	unit	0

2	8	1	2			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah		3 Laporan	511.428.636,00	APBD		3 Laporan	511.294.510,00
2	8	1	2	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	1 laporan	75.040.000,00	APBD	Listrik dan Wifi MPPA	1 laporan	75.000.000,00
2	8	1	2	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	1 laporan	40.000.000,00	APBD	Perawatan peralatan komputer, AC, sound system, printer, mesin foto copy dll	1 laporan	48.000.000,00
2	8	1	2	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	1 laporan	396.388.636,00	APBD	Honorarium THL, tenaga ahli progremer, statistik, IT, Jurnalis, CS, Satpam, Psikolog Klinis, Konselor	1 laporan	388.294.510,00
2	8	1	2			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah		37 Unit	95.000.000,00	APBD		37 Unit	95.000.000,00
2	8	1	2	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Kutai Kartanegara	20 unit	72.964.000,00	APBD		30 unit	70.000.000,00

2	8	1	2	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Kutai Kartanegara	4 unit	22.036.000,00	APBD		4 unit	15.000.000,00
2	8	1	2	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Kutai Kartanegara	3 unit	0	APBD	Rehab gedung serba guna, untuk forum anak dan satgas PPA (ex gedung BKKBN)	3 unit	10.000.000,00
2	8	2				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi pada organisasi kemasyarakatan		16,1 Persen	1.750.000.000,00	APBD		16,1 Persen	550.000.000,00
2	8	2	2	1		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota		56 Lembaga	750.000.000,00	APBD		56 Lembaga	160.000.000,00
2	8	2	2	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	1 Dokumen	250.000.000,00	APBD	Pelaksanaan penyusunan RAD PUG (Lokus Tenggarong)	1 Dokumen	0

2	8	2	2	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	1 dokumen	00.000.000,00	APBD	Pembentukan tim Pokja PUG kab. Kukar berdasarkan SK Bupati.	1 laporan	75.000.000,00
2	8	2	2	1	6	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Kab.Kutai Kartanegara	40 orang	200.000.000,00	APBD	Pendampingan penyusunan PPRG (GBS dan GAP)	40 orang	80.000.000,00

2	8	2	2	1	8	Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	20 orang	200.000.000,00	APBD	Sosialisasi peraturan perundangan-undangan tentang PUG (Lokus samarinda dan balikpapan)	40 orang	0
2	8	2	2	2		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang bergerak dlm bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan		28 Organisasi	350.000.000,00	APBD		28 Organisasi	325.000.000,00
2	8	2	2	2	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	1 Dokumen	150.000.000,00	APBD	Sosialisasi peraturan perundangan untuk peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang polhum dan sosek.	1 Dokumen	145.000.000,00
2	8	2	2	2	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab.Kutai Kartanegara	28 Organisasi	200.000.000,00	APBD	Rakor lembaga/organisasi perempuan kab. Kukar.	28 Organisasi	160.000.000,00

							Kewenangan Kabupaten/Kota							
2	8	2	2	3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota		28 lembaga	650.000.000,00	APBD		28 lembaga	65.000.000,00

2	8	2	2	3	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kab.Kutai Kartanegara	30 orang	250.000.000,00	APBD	Pelatihan tata kelola layanan pemberdayaan perempuan. (Lokus Tenggarong)	40 orang	65.000.000,00
2	8	2	2	3	4	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kab.Kutai Kartanegara	28 Lembaga	300.000.000,00	APBD	Advokasi kebijakan dan pendampingan serta fasilitasi kegiatan organisasi perempuan. (Lokus tersebar)	28 Lembaga	0
2	8	2	2	3	6	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab.Kutai Kartanegara	1 Dokumen	100.000.000,00	APBD	Pemberitaan kegiatan pemberdayaan perempuan (video, medsos, banner, leaflet. Baliho)	1 Dokumen	0
2	8	3				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif		100 Persen	2.100.000.000,00	APBD		100 Persen	100.000.000,00
2	8	3	2	1		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap perempuan		2 Dokumen	700.000.000,00	APBD		2 Dokumen	0

2	8	3	2	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	2 dokumen	400.000.000,00	APBD	1. Rakor pembentukan satgas PPA kekerasan terhadap perempuan. (Lokus kab. kukar) 2. Monev pelaksanaan program kebijakan pencegahan kekerasan terhap perempuan	2 dokumen	0

2	8	3	2	1	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	11 perangkat daerah	300.000.000,00	APBD	1. Advokasi kebijakan tentang penyusunan perda perlindungan perempuan kab kukar 2. Advokasi pendampingan layanan perlindungan perempuan pada perangkat daerah terkait	11 perangkat daerah	0
2	8	3	2	2		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekersan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota		6 Layanan	700.000.000,00	APBD		6 Layanan	70.000.000,00

2	8	3	2	2	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Kab.Kutai Kartanegara	50 orang	500.000.000,00	APBD	penjangkauan korban, visum, Biaya pengobatan dan perawatan rawat inap dan rawat jalan dan akomodasi korban /makan dan minum korban	50 orang	40.000.000,00

2	8	3	2	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	6 layanan	200.000.000,00	APBD	Layanan tindak lanjut pengaduan kasus Perempuan Ke Luar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (rujukan ke RSUD provinsi, pengantaran korban ke luar daerah)	6 layanan	30.000.000,00
2	8	3	2	3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota		6 Layanan	700.000.000,00	APBD		6 Layanan	30.000.000,00
2	8	3	2	3	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	1 dokumen	100.000.000,00	APBD	Advokasi fasilitasi sapras bagi penyediaan layanan perempuan korban kekerasan kab. Kukar	1 laporan	30.000.000,00

2	8	3	2	3	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kab.Kutai Kartanegara	30 orang	300.000.000,00	APBD	Pelatihan/Bimtek manajemen penanganan kasus bagi SDM, ASN, UPT P2TP2A, Tenaga Teknis profesional pada DP3A. (Lokus Samarinda / Balikpapan)	60 orang	0

2	8	3	2	3	3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Kab.Kutai Kartanegara	50 orang	50.000.000,00	APBD	Fasilitasi pembelian kebutuhan khusus perempuan (Lokus Kab. Kukar)	50 orang	0
2	8	3	2	3	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	1 dokumen	250.000.000,00	APBD	Bimtek lembaga layanan perlindungan perempuan Dharma wanita, PKK, GOW dll (Lokus Samarinda)	1 dokumen	0
2	8	4				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pusat pembelajaran keluarga yang terbentuk dalam mewujudkan KG dan hak anak		50 Persen	1.300.000.000,00	APBD		50 Persen	100.000.000,00
2	8	4	2	1		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat daerah Kabupaten/Kota		3 dokumen	550.000.000,00	APBD		3 dokumen	35.000.000,00
2	8	4	2	1	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak	Kab.Kutai Kartanegara	5 Perangkat Daerah	200.000.000,00	APBD	PKS dengan 5 perangkat daerah (Lokus 3 OPD dan 2 kecamatan)	5 Perangkat Daerah	35.000.000,00

							Kewenangan Kabupaten/Kota							
2	8	4	2	1	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab.Kutai Kartanegara	4 Dokumen	150.000.000,00	APBD	Pembuatan media promosi kualitas keluarga (spanduk, pamplet, media siaran, brosur) lokasi tersebar	4 Dokumen	0

2	8	4	2	1	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	3 Laporan	200.000.000,00	APBD	Puspaga dalam rangka kampanye perubahan perilaku percepatan penurunan stunting (Lokus Kab. Kukar)	3 Laporan	0
2	8	4	2	2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak		6 Lembaga	750.000.000,00	APBD		6 Lembaga	65.000.000,00
2	8	4	2	2	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kab.Kutai Kartanegara	4 Lembaga	150.000.000,00	APBD	Advokasi kebijakan dan pendampingan lembaga -lembaga non formal seperti LKSA, LK3, Lembaga - lembaga Keagamaan (Lokus Kab. Kukar)	4 Lembaga	30.000.000,00

2	8	4	2	2	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	50 Orang	400.000.000,00	APBD	Pelatihan peningkatan kualitas keluarga untuk menurunkan kemiskinan dan stunting (Pelatihan pijat refleksi untuk perempuan kepala keluarga) Lokus Samboja dan Tenggarong seberang	50 Orang	35.000.000,00

2	8	4	2	2	3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	1 Dokumen	200.000.000,00	APBD	Pelatihan tata kelola layanan peningkatan kualitas keluarga (Lokus tersebar di kukar)	2 Dokumen	0
2	8	5				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak		81,03 Persen	250.000.000,00	APBD		81,03 Persen	80.718.362,00
2	8	5	2	1		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dlam kelembagaan data tingkat Kabupaten/Kota		2 Dokumen	250.000.000,00	APBD		4 Dokumen	80.718.362,00
2	8	5	2	1	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab.Kutai Kartanegara	1 Dokumen	150.000.000,00	APBD	Penyediaan data gender dan anak kab. Kukar	1 Dokumen	0
2	8	5	2	1	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	1 Dokumen	100.000.000,00	APBD	Rakor / Seminar penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak kab. Kukar.	1 Dokumen	80.718.362,00
2	8	6				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak		750 Nilai	1.185.000.000,00	APBD		780 Nilai	215.000.000,00

2	8	6	2	1		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota		2 Dokumen	400.000.000,00	APBD		2 Dokumen	55.000.000,00

2	8	6	2	1	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kab.Kutai Kartanegara	30 Organisasi	250.000.000,00	APBD	Pelatihan konvensi hak anak lokus tersebar dan berdasarkan SK Kadisdik dan Kadinkes dan Target 20 Organisasi / 40 Orang Peserta (20 Sekolah Ramah Anak dan 20 Puskesmas Ramah Anak)	30 Organisasi	0
2	8	6	2	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	2 Dokumen	150.000.000,00	APBD	Pembinaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak berdasarkan SK Bupati Kukar (Perubahan SK dan Laporan Kegiatan)	2 Dokumen	55.000.000,00
2	8	6	2	2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota		4 Dokumen	785.000.000,00	APBD		4 Dokumen	160.000.000,00
2	8	6	2	2	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Kab.Kutai Kartanegara	300 Orang	250.000.000,00	APBD	Peringatan Hari Anak Nasional dan Jambore Forum	300 Orang	50.000.000,00

						Kabupaten/Kota	Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					Anak (Lokus Tenggarong)		

2	8	6	2	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	1 Dokumen	150.000.000,00	APBD	Perpustakaan ramah anak, pusat informasi sahabat anak yang akan distandarisi (Lokus tersebar, sesuai surat keputusan kadisdik dan kadispur)	2 Dokumen	150.000.000,00
2	8	6	2	2	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	4 Dokumen	185.000.000,00	APBD	Pembuatan media promosi pemenuhan hak anak (spanduk, pamplet, media siaran, brosur) lokasi tersebar	4 Dokumen	65.000.000,00
2	8	6	2	2	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	7 Dokumen	200.000.000,00	APBD	Pembentukan forum anak tingkat kecamatan dan kelurahan dasar intruksi bupati kukar tahun 2023 (Lokus 6 kecamatan dan 1 kelurahan)	7 Dokumen	45.000.000,00
2	8	7				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan		100 Persen	3.250.000.000,00	APBD dan DNF		100 Persen	215.000.000,00

							layanan komprehensif							
2	8	7	2	1		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota		2 dokumen	800.000.000,00	APBD dan DNF		2 dokumen	40.000.000,00

2	8	7	2	3	3	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu	Kab.Kutai Kartanegara	2 Kegiatan	0	APBD dan DNF	1. Penyusunan PKS dg instansi kab/kota serta monitoring dan Evaluasi PKS yg sdh ada dg kab/kota (Lokus Samarinda, Balikpapan, PPU, Kutin, Kubar, Bontang, RSJ Samarinda, RS Abdoel Moeis) 2. DRPPA percontohan di 10 desa berdasarkan zonasi di kab. Kukar	2 Kegiatan	0
2	8	7	2	1	4	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kab.Kutai Kartanegara	50 orang	300.000.000,00	APBD	1. Pencegahan KTA di kecamatan (Sekolah SMA-SMP) 2. Sosialisasi siswa- siswi untuk wilyah tenggarong	30 orang	40.000.000,00

2	8	7	2	1	6	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Kab.Kutai Kartanegara	2 dokumen	500.000.000,00	APBD		2 dokumen	0
2	8	7	2	2		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota		6 Layanan	1.250.000.000,00	APBD		6 Layanan	110.000.000,00

2	8	7	2	2	5	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Kab.Kutai Kartanegara	100 orang	1.000.000.000,00	APBD	penjangkauan korban, visum, Biaya pengobatan dan perawatan rawat inap dan rawat jalan dan akomodasi korban /makan dan minum korban	100 orang	50.000.000,00
2	8	7	2	2	6	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Kab.Kutai Kartanegara	25 layanan	250.000.000,00	APBD	Layanan tindak lanjut pengaduan kasus anak Ke Luar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (rujukan ke RSUD provinsi, pengantaran korban ke luar daerah)	25 layanan	60.000.000,00
2	8	7	2	2	7	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	1 Dokumen	0	APBD	Brosur dan spanduk tambahan aspirasi masy 200 juta	1 Dokumen	0

2	8	7	2	2	8	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	1 Dokumen	0	APBD	Satgas PPA	1 Dokumen	0

2	8	7	2	3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang dibentuk		2 Dokumen	1.200.000.000,00	APBD		2 Dokumen	65.000.000,00
2	8	7	2	3	4	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	Kab.Kutai Kartanegara	16 Lembaga	0	APBD	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Anak (LKSA)	16 Lembaga	35.000.000,00
2	8	7	2	3	5	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kab.Kutai Kartanegara	3 Kegiatan	400.000.000,00	APBD	1. Pembentukan PPATBM di 10 desa dan kelurahan 2. Kaji Tiru PPTABM, Dinkes, Dinsos, Kepolisian, Kejaksaan, DP3A	2 Kegiatan	30.000.000,00
2	8	7	2	3	6	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Kab.Kutai Kartanegara	50 orang	300.000.000,00	APBD	Pelatihan/Bimtek manajemen penanganan kasus bagi PPABM di 20 desa dan kelurahan serta lembaga terkait pelaksanaan di samarinda / balikpapan	50 orang	0

2	8	7	2	3	7	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Kab.Kutai Kartanegara	2 dokumen	250.000.000,00	APBD		2 dokumen	0
2	8	7	2	3	9	Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Kab.Kutai Kartanegara	1 dokumen	250.000.000,00	APBD			
										18.372.613.313,00				80.286.055.875,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025. Adapun proses penyusunan RKPD Tahun 2025 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja pemerintah, maka dengan beberapa catatan sebagai berikut :

A. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

1. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum memadai terutama untuk keperluan printer dan komputer yang sudah banyak mengalami rusak berat.
2. Keadaan kantor yang masih belum refresentatif untuk menyelenggarakan organisasi dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak khususnya ruangan untuk menangani kekerasan perempuan dan anak serta keperluan ruang arsip dan ruang barang rusak.
3. Ketiadaan sumber daya aparatur yang khusus untuk menangani perempuan dan anak korban kekerasan dari segi psikologis menjadikan kendala bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara dalam operasional organisasi.
4. Banyak lokasi korban kekerasan pada perempuan dan anak yang memerlukan biaya besar untuk dijangkau.
5. Mall Pelayanan Perempuan dan Anak (MPPA) yang masih memerlukan bangunan fasilitas sapras dan SDM

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak disesuaikan dengan adanya Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditunjuk langsung oleh Presiden RI melalui Kementerian PPPA RI pada Tahun 2006 bersama empat kabupaten/kota menjadi kabupaten menuju Kabupaten Layak Anak (Sidoarjo, Gorontalo, Jambi, Solo, dan Kutai Kartanegara) diperkuat dengan Instruksi Bupati Kutai Kartanegara nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kecamatan dan Kelurahan/ Desa. Dalam menentukan arah jalannya organisasi salah satunya *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara*
adalah Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Rencana Tindak Lanjut.

1. Mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pendirian aktifis Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) di setiap kecamatan dan di setiap desa ataupun kelurahan.
2. Mendorong upaya pembinaan pelaku usaha perempuan dalam rangka meningkatkan perekonomian perempuan di Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Mendorong OPD baik OPD di Kabupaten maupun OPD kecamatan untuk menginisiasi Kecamatan Layak Anak
4. Mendorong Pembangunan Mall Pelayanan Perempuan dan Anak (MPPA) di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh disiplin, dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance* khususnya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara.

p.RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencangan Akhir (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan dokomen perencanaan tahunan yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara,RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara substansial menjabarkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati dan program DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026.

Rencangan Akhir (RENJA) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan kinerja DPPKB untuk tahun keempat periode RENSTRA DPPKB 2021-2026 yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPPKB Tahun 2023 untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja RENSTRA dan RPJMD yang di selaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional.

Penyusunan Rencangan Akhir (RENJA) DPPKB Tahun 2025 mengacup ada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024. RENJA DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RENJA.
2. Penyusunan Rancangan Awal RENJA DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada RENSTRA DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara, evaluasi hasil RENJA tahun lalu dan evaluasi hasil RENJA tahun berjalan.
3. Penyusunan Rancangan RENJA berdasarkan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : P-15/SETDAKAB KUKAR/000.7.2/01/2024 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA- PD) Tahun 2024
4. Pembahasan Rancangan RENJA DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Forum OPD DPPKB untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kutai Kartanegara tahun 2024 memperhatikan kepada peraturan Perundang- undangan yang melandasi pelaksanaan RENJA dan arah garis kebijakan terkait yang dirumuskan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari dibuatnya Rencangan Akhir (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara Periode 2021-2026. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur

penilaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Tujuan dari Penyusunan Rencangan Akhir (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wujud Pertanggung jawaban dalam mencapai visi misi Pemerintah Daerah.
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran Aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu terarah dan terukur.
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 tahun.
4. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencangan Akhir (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksuddan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA–PD TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD Tahun lalu dan Capaian Renstra-PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA-PD
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1. Program dan Kegiatan
BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA-PD

Pencapaian keberhasilan kinerja program/kegiatan pada tahun 2023 secara keseluruhan capaian fisik rata-rata 95,4% dan realisasi keuanganrata- rata 80,8%.

Penjelasan Analisis Kinerja

Adapun analisis pencapaian kinerja output (fisik) sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah Kabupaten/Kota Realisasi Anggaran Fisik sebesar 99,7%.
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Realisasi Anggaran Fisik sebesar 90,6 %.
3. Program Pengendalian Penduduk Realisasi Anggaran Fisik sebesar 90,9 %
4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Realisasi Anggaran Fisik sebesar 96,3%.

   Untuk rekapitulasi capaian sebagaiman adalam Tabel T-29.

Penjelasan Analisis Keuangan Pencapaian keberhasilan kinerja keuangan program/kegiatan pada tahun 2023 secara keseluruhan target keuangan untuk Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp.32 .030.197.289,00 di realisasikan sebesar Rp.25.866.685.185,00

Adapun analisis pencapaian realisasi keuangan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target anggaran sebesar Rp17.635.624.219,00 terealisasi sebesar Rp15.189.209.897,00 atau tercapai sekitar 86,1 %.
2. Program Pengendalian Penduduk dengan target anggaran sebesar Rp1.484.609.420,00 terealisasi sebesar Rp 1.074.028.066,00 atau sekitar 72,3%.
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan target anggaran sebesar Rp6.570.152.000,00 terealisasi sebesar Rp3.897.848.589,00 atausekitar 59,3%.
4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan target anggaran sebesar Rp6.339.788.650,00 terealisasi sebesar Rp5.705.598.633,00 atau sekitar 90,2 %.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA DPPKB dan Pencapaian RENSTRA DPPKB s/d Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2023)	
					Target Renja- PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9	11=(10/4
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
	Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,10	85,10	85,10	85,10	100,00	85,10	255,30	3,00
1,1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen rencana anggaran dan evaluasi kinerja perangkat darah	885,00	177,00	177,00	177,00	100,00	177,00	531,00	0,60

	1.1.1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00	15,00	3,00
	1.1.2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	200,00	40,00	57,00	40,00	70,18	57,00	137,00	0,69
	1.1.3			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-P	100,00	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00	60,00	0,60
	1.1.4			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	200,00	-	40	40	100,00	40	80,00	0,40
	1.1.5			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-P	100,00	20,00	20	20	100,00	20	60,00	0,60
	1.1.6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	0,60
	1.1.7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	200,00	40,00	57,00	40,00	70,18	40,00	120,00	0,60
												-	
	1,2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuanagan perangkat daerah yang akuntabel	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	0,60
	1.2.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	70,00	14,00	14,00	14,00	100,00	14,00	42,00	0,60
	1.2.2			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	Jumlah waktu penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	0,60
	1.2.3			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,60
	1.2.4			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	200,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	0,18
	1.2.5			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5,00	2,00	2,00	2,00	100,00	1,00	5,00	1,00
	1,3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan barang milik daerah pada	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,60

				perangkat daerah									
	1.3.1		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah LAporan Barang Milik Daerah yang di Rekonsiliasi	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,60
	1.3.2		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang di lakukan Penatausahaan	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,60
											-	
	1,4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	340,00	68,00	68,00	68,00	100,00	1,00	137,00	0,40
	1.4.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	-	-		-			-	
	1.4.2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis	70,00	20,00		-	-		20,00	0,29
											-	
	1,5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	100,00	100,00	42	100,00	238,10	42	242,00	2,42
	1.5.1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	150,00	30,00	30	30,00	100,00	30	90,00	0,60
	1.5.2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Yang di sediakan	10,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	6,00	0,60
											-	
	1.5.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggndaan	134.310,00	225,00	26.862	26.862,00	100,00	26.862	53.949,00	0,4017
											-	
	1.5.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan Koran	2.200,00	960,00	960	440,00	45,83	960	2.360,00	1,07

	1.5.5			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	750,00	150,00	170	150,00	88,24	150	450,00	0,60
	1.5.6			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang ditata	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,60
												-	
	1,6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah	135,00	23,00	23,00	23,00	100,00	23,00	69,00	0,51
	1.6.1			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	59,00	7,00	7	7,00	100,00	7	21,00	0,36
	1.6.2			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Pagar Balai Penyuluhan KB	1,00	-	1,00	-	-	1,00	1,00	1,00
	1.6.3			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan sarana Prasarana gedung Kantor	75,00	30,00	30	30,00	100,00	30	90,00	1,20
												-	
	1,7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang di Sediakan	60,00	12,00	12	12,00	100,00	12	36,00	0,60
	1.7.1			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	60,00	12,00	12	12,00	100,00	12	36,00	0,60
	1.7.2			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60,00	12,00	12	12,00	100,00	12	36,00	0,60
	1.7.3			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Tenga Pendukung Non PNS	60,00	12,00	12	12,00	100,00	12	36,00	0,60
	1,8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah	763,00	171,00	171,00	171,00	100,00	171,00	513,00	0,67

	1.8.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran Pajak dan Perizinzn Kendaraan Serta Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas/Jabatan	55,00	11,00	11	11,00	100,00	11	33,00	0,60
												-	
	1.8.2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pembayaran Pajak dan Perizinzn Kendaraan Serta Pemeliharaan Kendaraan Operasional/Lapangan	800,00	160,00	160	160,00	100,00	160	480,00	0,60
												-	
	1.8.3			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung atau Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Direhabilitasi	5,00	1,00	1,00	-	-	1,00	2,00	0,40
												-	
	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK	50,00	30,00	30,00	30,00	100,00	30,00	90,00	1,80
					Tersedianya dokumen grand design kependudukan	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	3,00
	2,1			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersedianya dokumen grand design kependudukan	1,00	70,00	1,00	1,00	100,00	1,00	72,00	72,00
				Penyelerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan,Keluarga Berencana dan Pembanguna keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen	4,00				-		-	-
	2.1.1			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	3,00

	2.1.2			Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah sekolah/perguruan tinggi	30,00	3,00	3	6,00	200,00	3	12,00	0,40
	2.1.3			Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Materi	175,00	3,00	3	35,00	1.166,67	3	41,00	0,23
	2.1.4			Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah peserta	400,00	40,00	40	40,00	100,00	40	120,00	0,30
												-	
	2,2			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara	100,00	70,00	70,00	70,00	100,00	70,00	210,00	2,10
	2.2.1			Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Data	4,00	1,00	1	1,00	100,00	1	3,00	0,75
	2.2.2			Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Buku Profil	500,00	100,00	100	100,00	100,00	100	300,00	0,60
	2.2.3			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah KK	45.000,00	5.500,00	5500	5.000,00	90,91	5500	16.000,00	0,36
	2.2.4			Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah Faskes yang terdata	215,00	43,00	43	43,00	100,00	43	129,00	0,60
												-	
	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) cara moderen	77,25	77,15	77,15	77,15	100,00	77,15		
					Persentase peserta KB baru	15,23	15,13	15,13	15,13	100,00	15,13	45,39	2,98
					Cakupan angka (unmet need)	10	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	3,60
					persentase apseptor MKJP	16,16	16,05	16,05	16,05	100,00	16,05	48,15	2,98
					Persentase drop out (BO)	11,92	12,32	12,32	12,32	100,00	12,32	36,96	3,10
												-	
	3,1			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya kegitaan advokasi dan	25,00	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00	15,00	0,60

				KIE								
	3.1.1		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah pelaksanaan hari besar dan pameran	25,00	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00	15,00	0,60
	3.1.2		Komunikasi,informasi dan edukasi (KIE)program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah sarana KIE	25,00	2,00	2,00	2,00	200,00	2,00	6,00	0,24
	3.1.3		Penyediaan dan distribusi sarana KIE program KKBPK	Jumlah sarana KIE	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,60
	3.1.4		Promosi dan KIE proram KKBPK melalui media masa cetak dan elektronik dan media luar ruang	Jumlah kegiatan Promosi	20,00						-	-
	3.1.5		Penggunaan media masa cetak,elektronik,dan media lain nya sesuai keaifan budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK	Jumlah Media	13,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,23
	3.1.6		Pelaksanaan Mekanisme oprasional Program KKBPK melalui rapat koordinas (Rakorcam) rapat koordinasi desa (Rakordes),dan minilokakarya	Jumlah Peserta	540,00	108,00	108,00	108,00	100,00	108,00	324,00	0,60
	3.1.7		Pengelolaan operasional dan sarana dibalai penyuluhan KKBPK	Jumlah kegiatan di balai penyuluhan KB	90,00	18,00	18,00	18,00	100,00	18,00	54,00	0,60
	3,2		Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksana nya kegiatan oprasional KB dilapangan	1185		237	237	100,00	237	474,00	0,40
											-	
	3.2.1		Pembinaan IMP dan program KKBPK dilini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah IMP yang di bina	1185	237	237	237	100,00	237	711,00	0,60
	3.2.2		Penyediaan sarana pendukung opeasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung	281	5	5	5	100,00	5	15,00	0,05
	3.2.3		Penguatan pelaksanaan penyuluhan,pergerakan,pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga beencana /prnyuluh lapangan keluarga berencana PKB/PLKB	Jumlah PKB/PLKB	345	69	69	69	100,00	69	207,00	0,60
	3.2.4		Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD/Sub PPKBD	1185	237	237	237	100,00	237	711,00	0,60
	3,3		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya alat, obat dan kontasepsi pada Fasilitas Kesehatan	200,00	40,00	40,00	40,00	100,00	40,00	120,00	0,60

	3.3.1			Pengendalian Pendistribusian Alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Faskes	200,00	40,00	40,00	40,00	100,00	40,00	120,00	0,60
	3.3.2			Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontarepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah Apseptor MKJP	3.500,00	700,00	700,00	700,00	100,00	700,00	2.100,00	0,60
	3.3.3			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana penunjang pelayanan KB	15,00	5,00	5	3,00	60,00	3,00	11,00	0,73
	3.3.4			Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Apseptor yang dilayani	1.920,00	1.600,00	1600	320,00	20,00	320,00	2.240,00	1,17
												-	
	3,4		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Cakupan ORMAS / POKJA yang terlibat dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	80,00	60,00	60,00	60,00	100,00	60,00	180,00	2,25
	3.4.1			Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Ormas dan Mitra Kerja	190,00	38,00	38	38,00	100,00	38,00	114,00	0,60
	3.4.2			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Persentase Kampung KB Bernilai Baik	100,00	20,00	20	20,00	100,00	20,00	60,00	0,60
	3.4.3			Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB bernilai Baik	100,00	20,00	20	20,00	100,00	20,00	60,00	0,60
												-	
	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)										-	
					Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	7348	65,31	65,31	65,31	100,00	65,31	195,93	0,03
					Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	9197	72,97	72,97	72,97	100,00	72,97	218,91	0,02

				Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	64,63	57,32	57,32	57,32	100,00	57,32	171,96	2,66
				Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	9,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	6,00	0,67
				Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	100,00	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00	150,00	1,50
				Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	73,18	56,09	56,9	56,00	98,42	56,00	168,09	2,30
											-	
	4,1		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan pembinaan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	40,15	30,72	30,72	30,72	100,00	30,72	92,16	2,30
											-	
	4.1.1		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah penyediaan sarana kelompok	164,00	54,00	54,00	54,00	100,00	54,00	162,00	0,99
											-	
	4.1.2		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader yang dilatih	695,00	215,00	215,00	75,00	34,88	75,00	365,00	0,53
	4.1.3		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,	Jumlah Kelompok	1.470,00	50,00	50,00	132,00	264,00	132,00	314,00	0,21

				PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
	4.1.4			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Peserta kegiatan promosi dan sosialisasi	750,00	150,00	150,00	150,00	100,00	150,00	450,00	0,60
	4.1.5			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah lomba-lomba	9,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,33
	4.1.6			Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Dokumen	3,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	1,00
												-	
	4,2			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan peran ORMAS dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	90,00	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00	150,00	1,67
	4.2.1			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kerjasama dengan mitra dan ormas	48,00	18,00	18,00	18,00	100,00	18,00	54,00	1,13
	4.2.2			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta	516,00	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	360,00	0,70
	4.2.3			Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah peserta	241,00	28,00	28,00	28,00	100,00	28,00	84,00	0,35

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam kondisi umum,pencapaian kinerja pelayanan DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPPKB sebagai organisasi perangkat daerah urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada table berikut:

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM	IKK	Target RENSTRA PD				Realisasi capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			85,10	85,25	85,40	85,55	85,10	85,25	85,40	85,55	
2	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit BPK/Inspektorat			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase Ketepatan Input RUP pada Aplikasi SIRUP			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah			65,00	70,00	75,00	75,00	65,00	70,00	75,00	75,00	
7	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK			30,00	35,00	40,00	45,00	30,00	35,00	40,00	45,00	
8	Tersedianya dokumen grand design kependudukan			1,00	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	
9	Angka Total Fertility Rate (TFR)			2,20	2,18	2,16	2,14	2,53	2,20	2,16	2,14	
10	Angka Pemakaian Kontrasepsi CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun			77,15	77,19	77,20	77,22	77,15	77,19	77,20	77,22	
11	Cakupan Pelayanan KB Baru			15,13	15,15	15.17	15.20	15,13	15,15	15.17	15.20	
12	Menurunnya angka Drop			12,32	12,22	12,12	12,12	12,32	12,22	12,12	12,12	

	Out (DO)											
13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)			12,00	11,50	11,00	10,50	12,00	11,50	11,00	10,50	
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			16,05	16,08	16,10	16,13	16,05	16,08	16,10	16,13	
15	Indek Pembangunan Keluarga			57,50	58,50	59,00	59,50	57,50	58,50	59,00	59,50	
16	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan			2,00	3,00	5,00	7,00	2,00	3,00	5,00	7,00	
17	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa			50,00	66,67	77,78	88,89	50,00	66,67	77,78	88,89	
18	Cakupan Keluarga Akseptor Yang Terlibat Dalam Kelompok Ketahanan Keluarga			4,05	4,10	4,15	4,20	4,05	4,10	4,15	4,20	
19	Cakupan PUS Perserta KB Anggota UPPKS Yang Ber-KB Mandiri			56,09	60,82	64,65	70,26	56,09	60,82	64,65	70,26	
20	Cakupan Keluarga Anggota BKB Yang Ber-KB			65,31	67,25	69,78	71,31	65,31	67,25	69,78	71,31	
21	Cakupan Keluarga Anggota BKL Yang Ber-KB			57,32	58,15	59,36	61,32	57,32	58,15	59,36	61,32	
22	Cakupan Keluarga Anggota BKR Yang Ber-KB			72,97	76,13	80,93	84,98	72,97	76,13	80,93	84,98	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu: Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain: jumlah, struktur dan komposisi penduduk,laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk. Kedua, berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan. Ketiga adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan. Keempat adalah data dan informasi penduduk dan kelima adalah penyerasian kebijakan kependudukan. Pembangunan Kependudukan dan KB di Indonesia khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara harus benar - benar dapat memanfaatkan jendela peluang demografi untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa isu strategis terkait urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baik secara regional dan nasional khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

a. Upaya dalam mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan sesuai dengan hak reproduksi.
b. Perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan di pengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
c. Upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga berkualitas menghasilkan keluarga yang berketahanan.

Beberapa Permasalahan yang di hadapi oleh DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya pencapaian tujuan “ mewujud kan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang tumbuh seimbang, berkualitas dan berdaya saing“ yaitu:

a. Mempertahan kan Angka Total Fertility Rate (TFR) sekitar 2,13 pada tahun 2023, dan ada beberapa faktor yang membuat TFR tinggi antara lain :
    1. Akses pelayanan Keluarga Berencana yang terbatas.
    2. Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB serta Kader KB yang belum maksimal.

3. Kurangnya sarana dan prasarana media KIE.
4. Kurangnya tenaga penyuluh PLKB dan PKB

b. Belum optimal nya Basis data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) antar stakeholder yang disebabkan oleh belum optimalnya pendataan serta koordinasi dan sinkronisasi antar stakeholder.
c. Belum optimalnya pelaksanaan 8 (Delapan) fungsi keluarga yang disebabkan oleh belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan kelompok ketahanan keluarga

Untuk menanggulangi permasalahan dan isu-isu diatas maka Dinas Pengendalian Penduuduk dan Keluarga Berencana menetapkan strategi dan kebijakan. Adapun strategi yang akan dilakukan adalah:

a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja DPPKB
b. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi kebijakan antar stakeholder dalam program KKBPK
c. Meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana
d. Meningkatkan pembinaan kelompok ketahanan keluarga

Selanjut nya beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan oleh DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah:

a. Peningkatan Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pada DPPKB
b. Peningkatan kualitas basis data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
c. Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas.
d. Penguatan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi KKBPK.
e. Peningkatan jumlah kelompok ketahanan keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK-R,PPKS,UPPKS/UPPKA)
f. Pengembangan dan pemberdayaan kelompok ketahanan keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK-R,PPKS,UPPKS/UPPKA).
g. Penyediaan sarana dan prasarana serta operasional kelompok ketahanan keluarga (BKB.BKR.BKL,PIK-,PPKS,UPPKS/UPPKA).
h. Peningkatan promosi dan sosialiasi program KKBPK.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 maka dapat dijelaskan bahwa RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Selanjutnya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

Adapun dalam penyusunannya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang terkait seperti RPJM Nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RPJMD dan RKP Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkankan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD.

Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah terciptanya sinkronisasi dan integrasi Program/Kegiatan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana menyebutkan bahwa program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak- hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang di rencanakan. Memperhatikan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi serta berdasarkan identifikasi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan perkiraan kondisi tahun 2025 serta prospek tahun 2025 maka prioritas dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 di tetapkan sebagai berikut :

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Program dan Kegiatan yang dimasukkan

dalam rancangan awal RKPD merupakan program usulan hasil penyesuaian PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 dan KEPMEN DAGRIN Nomor 050-3708 Tahun 2020. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat di lihat pada table di bawah ini : TC 31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Usulan RENJA RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tenggarong	**1).** Nilai SAKIP Perangkat Daerah **2).** Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit BPK/Inspektorat **3).** Persentase Ketepatan Input RUP pada Aplikasi SIRUP **4).** Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKP per Tanggal 31 Maret **5).** Tingkat Kepatuhan LHKASN per Tanggal 31 Maret **6).** Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	1). 85.55 2). 100 3). 100 4). 100 5). 100 6). 75	12.100.954.484,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tenggarong	**1).** Nilai SAKIP Perangkat Daerah **2).** Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit BPK/Inspektorat **3).** Persentase Ketepatan Input RUP pada Aplikasi SIRUP **4).** Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKP per Tanggal 31 Maret **5).** Tingkat Kepatuhan LHKASN per Tanggal 31 Maret **6).** Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	1). 85.55 2). 100 3). 100 4). 100 5). 100 6). 75	11.961.274.818,00

1,1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	177,00	475.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	177,00	1.000.000.000,00
						Penyelenggaraan Walidata Mendukung Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	50.000.000
						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Darah	Tenggarong	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	250.000.000

						Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	50.000.000
0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,00	175.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,00	450.000.000
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	40,00	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen RKA- SKPD	40,00	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen RKA-P SKPD	20,00	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen RKA-P SKPD	20,00	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokuman DPA-SKPD	40,00	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokuman DPA- SKPD	40,00	-
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen DPA-P SKPD	20,00	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen DPA-P SKPD	20,00	-
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	50.000.000
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	40,00	200.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	40,00	150.000.000

			Perangkat Daerah					Perangkat Daerah		
1,2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	12,00	8.507.390.798,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	12,00	8.363.711.132,00
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	14,00	8.217.390.798	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	14,00	8.063.711.132
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	Tenggarong	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	15.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	Tenggarong	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	150,00	

1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00	25.000.000
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulnan/Triwulanan/ Semester an SKPD	40	250.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulnan/Triwulanan /Semes teran SKPD	60,00	250.000.000
1.2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	10.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,00	25.000.000
1,3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1,00	105.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1,00	105.000.000,00
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tenggarong	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	25.000.000
						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	50.000.000
1.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang direkonsiliasi	1,00	75.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang	1,00	30.000.000

								direkonsiliasi		
1.3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang dilakukan penatausahaan	1,00	30.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang dilakukan penatausahaan	1,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdaarkan Tugas dan Fungsi					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdaarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	35,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2,00	
1,4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1,00	50.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1,00	50.000.000,00

1.4.2	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Tenggarong	Jumlah Peserta Bimtek Implementasi Perundang-Undangan	4	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Peserta Bimtek Implementasi Perundang-Undangan	-	50.000.000
1.4.3						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tenggarong	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25,00	
1,5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Layanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	464.629.800,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Layanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	464.629.800,00
1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	30	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00	100.000.000
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Jenis Bahan Logistik yang disediakan	2	60.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,00	60.000.000
1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan yang disediakan	26.862	19.999.800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan yang disediakan	225,00	19.999.800
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tenggarong	Jumlah Bahan Bacaan	440	9.630.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	960,00	9.630.000

								Undangan yang Disediakan		
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi S	Tenggarong	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	150	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150,00	200.000.000
1.5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Arsip yang ditata	500	75.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,00	75.000.000
1.5.7						Penyediaan Bahan/Material	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	
1.5.8						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1,00	
1,6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tenggarong	Peralatan gedung kantor, kelengkapan gedung kantor dan bangunan pagar	23,00	150.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tenggarong	Peralatan gedung kantor, kelengkapan gedung kantor dan bangunan pagar	23,00	150.000.000,00
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Peralatan gedung kantor	15	75.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14,00	75.000.000
1.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Samboja	Jumlah Bangunan Pagar Balai	15	75.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Samboja	Jumlah Bangunan Pagar Balai	1,00	75.000.000

	Lainnya		Penyuluhan KB			atau Bangunan Lainnya		Penyuluhan KB		
	Pembangunan Balai Penyuluhan KB	Tabang	Bangunan Balai KB	1		Pembangunan Balai Penyuluhan KB	Tabang	Bangunan Balai KB	1	
1.6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Perlengkapan sarana prasarana gedung kantor	-	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2,00	
1,7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Tenggarong	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12,00	2.141.032.308,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Tenggarong	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12,00	1.620.032.308,00
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12,00	200.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12,00	200.000.000
1.7.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah waktu penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,00	150.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah waktu penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,00	75.000.000
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS	12,00	1.791.032.308	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS	12,00	1.345.032.308

1,8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong	Jumlah Barang Milik Daerah	171,00	207.901.578,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong	Jumlah Barang Milik Daerah	171,00	207.901.578,00
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak	11,00	60.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak	11,00	60.000.000
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak	160,00	97.901.578	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak	135,00	97.901.578
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya uang dipelihara / direhabilitasi	1,00	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya uang dipelihara / direhabilitasi	1,00	50.000.000
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kutai Kartanegara	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK	30,00	650.000.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kutai Kartanegara	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK	30,00	1.346.540.000,00
2,1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas	Tenggarong	Cakupan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dalam pengendalian	70,00	225.000.000,00	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka	Tenggarong	Cakupan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dalam	70,00	300.000.000

	Penduduk		kuantitas penduduk			Pengendalian Kuantitas Penduduk		pengendalian kuantitas penduduk		
2.1.1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap kependudukan ,keluarga berencana dan pembangunan keluarga program KKBPK	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1		Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1,00	75.000.000
2.1.2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tenggarong	Dokumen grand design	1		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tenggarong	Dokumen grand design	1,00	

2.1.3	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Tenggarong	Terbentuknya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	6	75.000.000	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Tenggarong, Loa Kulu Kota, Loa Janan, Sebulu, Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	6,00	75.000.000
2.1.4	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Tenggarong	Tersedianya Materi Pendidikan dan Kependudukan	6	75.000.000	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	6,00	75.000.000
	Pengendalian Program KKBPK	Tenggarong		1		Pengendalian Program KKBPK	Tenggarong		1	
2.1.5	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Tenggarong	Peserta Rapat	80	75.000.000	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	80,00	75.000.000
2.1.6						Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Kutai Kartanegara	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang	18	

								Kependudukan		
2.1.7						Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	20	
2,2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara	70,00	425.000.000,00	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara	70,00	1.046.540.000,00
2.2.1	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kutai Kartanegara	Database	1	150.000.000	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1,00	150.000.000
2.2.2	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kutai Kartanegara	Buku Profil	100	100.000.000	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan	1,00	100.000.000

								Keluarga		
2.2.3	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tenggarong	KK Yang Terdata	10.000	175.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tenggarong	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	10.000	225.000.000
2.2.4						Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	20,00	571.540.000
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kutai Kartanegara	Angka Total Fertility Rate (TFR)	2,20	1.060.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Kutai Kartanegara	Angka Total Fertility Rate (TFR)	2,20	1.915.000.000,00
			Angka Pemakaian CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15- 49 Tahun	77,15				Angka Pemakaian CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun	77,15	
			Angka peserta KB Baru	15,13				Angka peserta KB Baru	15,13	
			Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Persentase	12,00				Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Persentase	12,00	
			Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	16,05				Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	16,05	
			Persentase Angka Drop Out Akseptor	12,32				Persentase Angka Drop Out Akseptor	12,32	

3,1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kutai Kartanegara	Terlaksananya kegitaan advokasi dan KIE	5,00	535.000.000,00	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kutai Kartanegara	Jumlah kegiatan KIE	5,00	760.000.000,00
						Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	18	100.000.000
3.1.1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakerholder dan Mitra Kerja	Kutai Kartanegara	Perayaan hari besar dan pameran	5	260.000.000	Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	6,00	260.000.000

3.1.2	Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kutai Kartanegara	Jumlah Jenis Kegiatan KIE	2	75.000.000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2,00	300.000.000
3.1.3	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik dan Media Luar Ruang	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	5	100.000.000	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana KIE yang didistribusikan	5,00	100.000.000
3.1.4	Penggunaan Media Masa Cetak Elektronik dan Media Lain nya sesuai kearipan Budaya Lokal dalam pencitraan program KKBPK	Kutai Kartanegara	Jumlah Media Yang Digunakan	3	100.000.000	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Kutai Kartanegara	Jumlah Media Yang Digunakan	3,00	

3.1.5						Pengendalian Program KKBPK	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	8	
3,2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)	Kutai Kartanegara	Jumlah PKB/PLKB	40,00	100.000.000,00	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)	Kutai Kartanegara	Jumlah PKB/PLKB	40,00	280.000.000,00
3.2.1	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk Petugas KB / Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kutai Kartanegara	Jumlah PKB/PLKB	-	100.000.000	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk Petugas KB / Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	58	

	Fasilitasi Pelaksanaan,Penyuluhan Penggarakan Pelayanan dan Pengembangan Progam Bangga Kencana Untuk Petugas Keluarga Berencana,Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB,PLKB)					Fasilitasi Pelaksanaan,Penyuluhan Penggarakan Pelayanan dan Pengembangan Progam Bangga Kencana Untuk Petugas Keluarga Berencana,Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB,PLKB)	Kutai Kartanegara, Semu a Kecamatan semua desa	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1	130.000.000
3.2.2	Penyediaan sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana Pendukung PLKB/PKB	69		Penyediaan IMP dan Program KKBPK Lini Lapangan Oleh PKB/PLKB	Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	58	100.000.000
3.2.3	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kutai Kartanegara	Jumlah PKB/PLKB	69		Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	250	50.000.000

								Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		
	Penyediaan Dukungan Ayoman Kompilasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kutai Kartanegara		1		Penyediaan Dukungan Ayoman Kompilasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kutai Kartanegara		1	
	Peningkatan Kopetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kutai Kartanegara		1		Peningkatan Kopetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kutai Kartanegara		1	
3,3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Cakupan ORMAS / POKJA yang terlibat dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	60,00	225.000.000,00	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Alat Obat dan Kontrasepsi Pada Fasilitasi Kesehatan	40,00	425.000.000,00

						Pemerintah Daerah Yang Mendapatkan Fasilitasi dan embinaan Pendampingan Ibu hamil dan ibu Pasca Persalinan	Kutai Kartanegara	Pemerintah Daerah Yang Mendapatkan Fasilitasi dan pembinaan Pendampingan Ibu hamil dan ibu Pasca Persalinan	40,00	100.000.000,00
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kutai Kartanegara	Jumlah Jenis Sarana Penunjang Pelayanan KB	3	75.000.000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	10	75.000.000
3.3.1	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kutai Kartanegara	Jumlah Apseptor Yang Dilayani	400	150.000.000	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	38,00	150.000.000
3.3.2	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya					Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4	100.000.000

3.3.3						Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Desa/ Kelurahan	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	5,00	
3.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kutai Kartanegara			200.000.000,00	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kutai Kartanegara			450.000.000,00
3.4.1	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	38	100.000.000	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	38	100.000.000
3.4.2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	40	100.000.000	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	38	100.000.000

	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas					Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah DASHAT di Kampung KB	20	100.000.000

						Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kutai Kartanegara	Jumlah Lapangan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	2	150.000.000
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kutai Kartanegara	Indek Pembangunan Keluarga	59,50	1.390.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kutai Kartanegara	Indek Pembangunan Keluarga	59,50	2.415.000.000,00
			Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	71,31				Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	71,31	
			Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	84,98				Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	84,98	
			Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	61,32				Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	61,32	
			Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	2,00				Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	2,00	
			Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	50,00				Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	50,00	

			Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	56,09				Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	56,09	
4,1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kutai Kartanegara	Cakupan pembinaan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	30,72	850.000.000,00	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kutai Kartanegara	Jumlah Kelompok, Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	35.75	1.875.000.000,00

4.1.1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kutai Kartanegara	Jumlah penyediaan sarana kelompok	30	200.000.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	55,00	200.000.000
4.1.2	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kutai Kartanegara	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	240	200.000.000	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Apseptor UPPKA	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	930,00	500.000.000

4.1.3	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kutai Kartanegara	Jumlah kelompok	394	300.000.000	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Apseptor UPPKA	Kutai Kartanegara	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	394,00	600.000.000
4.1.4	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kutai Kartanegara	Peserta kegiatan promosi dan sosialisasi	150	75.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10,00	75.000.000
4.1.5	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kutai Kartanegara	Jumlah lomba-lomba	2	75.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta	Kutai Kartanegara	Jumlah lomba-lomba	2,00	225.000.000

						Pengelolaan Keuangan Keluarga)				

						Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB,BKR,BKL,Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	50,00	275.000.000
4.1.6	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung tercapaian IPK	Kutai Kartanegara	Dokumen Kebijakan	5		Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Kutai Kartanegara	Dokumen Kebijakan	20,00	
4,2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kutai Kartanegara	Cakupan peran ORMAS dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	50,00	540.000.000,00	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kutai Kartanegara	Cakupan peran ORMAS dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	50,00	540.000.000,00

4.2.1	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kutai Kartanegara	Jumlah kerjasama dengan mitra dan ormas	4	150.000.000	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4,00	150.000.000
4.2.2	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kutai Kartanegara	Jumlah peserta	68	215.000.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	18,00	215.000.000

4.2.3	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kutai Kartanegara	Jumlah peserta	50	175.000.000	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	18,00	175.000.000
				TOTAL	15.200.954.484,00				TOTAL	17.637.814.818,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan RENJA 2025 ini ada usulan masyarakat khusus penentuan perumusan program dan kegiatan Kelompok Kerja berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, Musrenbang SKPD tingkat Provinsi dan Musrenbang kabupaten/kota serta mengakomodir usulan dari Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Beberapa isu strategis peningkatan kesejahteraan keluarga sebagaimana yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara Periode 2021- 2026, yang harus mendapat perhatian khusus adalah Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera atau program KKBPK, maka di perlukan penguatan program dan kegiatan melalui penajaman pada tujuan dan sasaran srategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang harus bermuara pada Isu Srategis Kutai Kartanegara yaitu Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan dengan sasaran meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan hingga tingkat desa dan terciptanya budaya

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 TC 32

USULAN 2025					
NO	KAMUS USULAN	KECAMATAN	JUMLAH	DIPROSES	ANGGARAN
1	Penyediaan Alat Penunjang /peraga (BKB KIT,BKB HI,,BKL KIT STUNTING,BKR KIT,KIT Siap Nikah Anti Stunting	Sebemban,Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Diproses	50.000.000
2	Pelatihan Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Desa Muara Enggelam,Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Diproses	50.000.000
3	Penyediaan Alat Penunjang /peraga (BKB KIT,BKB HI,,BKL KIT STUNTING,BKR KIT,KIT Siap Nikah Anti Stunting	Teluk Pemedas,Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Diproses	50.000.000
4	Pelatihan Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Teluk Pemedas,Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Diproses	50.000.000

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu di selenggarakan pembangunan yang berkelanjutan, terencana dan terarah. Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan bagian integral dan terpenting dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakan nya Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan psesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

Sebagai mana diketahui bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 68 tahun 2016 Tentang kedudukan Sususan Organisasi Fungsi serta Tata Kerja perangkat Daerah sebagai instansi yang diberi kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dituntut mempunyai Rencana Kerja (RENJA).

Rencana Kerja (RENJA di susun berdasarkan program yang terencana, terarah serta terukur yang di harapkan dapat memenuhi kehendak aspirasi serta partisipasi masyarakat sejalan

Dengan visi Pemerintah KabupatenKutai Kartanegara.

Tahun 2024 merupakan tahun ke- 4 pelaksanaan Rencana Strategis

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2021
s/d2026 disusun berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun	2014
tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 9 tahun	2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun tentang Pemerintah Daerah.	2014

Mengacu pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017, maka adarencana aksi untuk mereview Dokumen RENSTRA Dinas sehingga akan terjadi Perubahan terhadap indicator sasaran RENSTRA.Hal ini penting mengingat RENSTRA merupakan acuan implementatif bagi seluruh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini memuat visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijak sanaan, program dan kegiatan RENSTRA SKPD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang di tetapkan dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja SKPD untuk kurun waktu 1(satu) tahun.

3.2 . Tujuan dan Sasaran RENJA-PD

Maksud dari dibuatnya Rencana kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetap kan oleh Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara Periode 2021-2026. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Beberapa isu penting pembangunan terkait urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baik ditingkat Nasional, Regional maupun ditingkat daerah di antaranya

Adalah sebagai berikut :

1. Upaya dalam mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur ke hamilan sesuai dengan hak reproduksi.

2. Perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan di pengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
3. Upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga berkualitas menghasilkan keluarga yang berketahanan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menghadapi berbagai isu penting tersebut telah menyusun tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan sebagai berikut:

VISI (RPJMD)	:	**"Mewujud kan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"**		
MISI (RPJMD)*	:	**Meningkatkan Pembangunan Daya Manusia Yang Berakhlak Unggul dan Berbudaya**		
Tujuan		**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkat nya Pembangunan Keluarga elalui pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana		Meningkatnya per ansta keholder dalam program Kependudukan Kel uarga Berencanadan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Meningkatkan koordi nasi sinkronisasi, harmon isasi kebijakan antar stakeholder dalam programKKBPK	Peningkatan kualitas basis data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
		Menurun nya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49tahun)	Meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana	Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas
				Penguatan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi KKBPK
				Peningkatan kuantitas dan Kualitas Tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan

				Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR,BKL,PIK-R,PPKS, UPPKS/UPPKA)
				Penyediaan sarana danprasarana serta operasional kelompok ketahanan keluarga (BKB.BKR.BKL,PIK-R,PPKS, UPPKS/UPPKA)
		Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahyang Berkualitas dan melayani	Meningkatkan transparans dan akuntabilitas kinerja DPPKB	Peningkatan Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pada DPPKB

Adapun beberapa indikator program dan kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2023 yang mengacu pada target RENSTRA 2021-2026 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA-PD		TARGETKINERJATUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIRPERIODERENSTRA PD
					2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Meningkatnya Pembangunan Keluarga melalui Pengendalian Kependuduk dan keluarga Berencana		IndekPembangunan Keluarga	Angka	-	57.00	57.50	58.50	60.00	63.00	65.00	65.00
		Meningkatnya peran Stakeholder dalam program KKBPK	Cakupan stakeholde ryang Terliba tdalam program KKBPK	Persen	-	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	50.00
		Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) Per WUS (15-49tahun)	Total FertilityRate(TFR)	Angka	2.24	2.22	2.20	2.18	2.16	2.14	2.12	2.12
		Meningkatnya pemberdayaan keluarga	Cakupan Keluarga Aksep or Yang Terlibat Dalam Kelompok Ketahanan Keluarga	Persen	-	4.00	4.05	4.10	4.15	4.20	4.25	4.25

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Pencapai Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang di berikan kewenangan melaksanakan urusan wajib bukan pelayanan dasar, berusaha memberikan pelayanan dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan Visi,Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati. Dalam upaya pemberian layanan pada masyarakat masih terdapat permasalahan yang di sebabkan ada nya faktor penghambat.Namun demikian terdapat factor pendorong yang berkontribusi positif dalam perbaikan layanan. Permasalahan, faktor penghambat dan faktor pendorong dapat dilihat pada table berikut:

PERMASALAHANPOKOK (eselon II)	PERMASALAHAN (eselon III)	AKAR MASALAH (eselon IV)
Rendahnya Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Kutai Kartanegara	Kurangnya peran stakeholder dalam Program KKBPK	Belum optimalnya basis Data Kependudukan, KeluargaBerencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) antar stakeholder
	Masih tingginya angkaTotal Fertility Rate (TFR) diKabupaten Kutai Kartanegara	Akses pelayanan yang kurang
		Kuantitas dan kualitas Tenaga penyuluh KB dan Petugas lapangan KB serta

		Kader KB yang belum maksimal
		Kurangnya Sarana Prasarana Media KIE
	Kurangnya pemberdayaan keluarga	Belum optimalnya Pembinaan dan Pemberdayaan kelompok Ketahanan keluarga
		Belum terpenuhinya sarana
		Dan prasarana serta Operasional kelompok Ketahanan keluarga

Uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi terutama dengan ada nya PERMENDAGRIN Nomor 90 Tahun 2019 dan KEPMENDAGRI Nomor 050-

   3708 Tahun 2020, maka Program pada Dinas PPKB Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 sebanyak 1 Program Generik dan 3 Program Teknis. Dengan perincian dapat dilihat dari Tabel Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Berdasarkan Sumber Pendanaan tahun 2025.
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyesuaikan jenis, target dan sasaran program maupun kegiatan, Lokasi kegiatan bisa bersifat menyeluruh di di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegra untuk Kegiatan yang bersifat pendampingan dan juga yang terfokus ke satu Kecamatan atau Desa jika jenis kegiatanya bersifat Pelatihan Ketrampilan.
3. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif di tahun 2025 adalah sebesar Rp. 17.637.814.484, -

b. Adanya 3 penambahan Sub Kegiatan baru yaitu Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, Pelaksanaan Pengumpulan Data Statsistik Sektoral Daerah, Pelaksanaaaan Form Perangkat Daeah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

d Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana format tabel TC 33 :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Tatget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Tatget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	1). Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2). Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit BPK/Inspektorat 3). Persentase Ketepatan Input RUP pada Aplikasi SIRUP 4). Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN per Tanggal 31 Maret 5). Tingkat Kepatuhan LHKASN per Tanggal 31 Maret 6). Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah		1). 85.40 2). 100 3). 100 4). 100 5). 100 6). 75	**11.961.274.818,00**			1). 85.40 2). 100 3). 100 4). 100 5). 100 6). 75	**12.468.954.484,00**
1,1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	177,00	1.000.000.000,00	APBD		177,00	**510.000.000,00**
	Penyelenggaraan Walidata Mendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1,00	50.000.000				
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Darah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1,00	250.000.000				
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1,00	50.000.000				
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	5,00	450.000.000,00	APBD		6,00	200.000.000,00
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	40,00		APBD		40,00	50.000.000,00
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-P SKPD	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	20,00		APBD		20,00	20.000.000,00

1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokuman DPA-SKPD	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	40,00	-	APBD	40,00	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-P SKPD	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	20,00	-	APBD	20,00	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	12,00	50.000.000,00	APBD	12,00	40.000.000,00
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	40,00	150.000.000,00	APBD	40,00	200.000.000,00
1,2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	14,00	8.363.711.132,00	APBD	14,00	8.507.390.798,00
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	12,00	8.063.711.132,00	APBD	12,00	8.217.390.798,00
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1,00	-	APBD	1,00	15.000.000,00
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	40,00	25.000.000,00	APBD	40,00	15.000.000,00
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulnan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1,00	250.000.000,00	APBD	1,00	250.000.000,00
1.2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab.Kutai Kartanegara	1,00	25.000.000,00	APBD	1,00	10.000.000,00

			Tenggarong					
			Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong					
1,3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat D	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1,00	105.000.000,00	APBD	1,00	105.000.000,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1	25.000.000			75.000.000

	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2	50.000.000			30.000.000
1.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang direkonsiliasi	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	68,00	30.000.000,00	APBD		
1.3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang dilakukan penatausahaan	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	-		APBD	-	
			Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong					
1,4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	42,00	50.000.000,00	APBD	42,00	410.048.000,00
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	30,00		APBD	30,00	360.048.000,00
1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	2,00	50.000.000,00	APBD	2,00	
1.4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong			APBD		50.000.000,00
1,5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	26.862,00	464.629.800,00	APBD	26.862,00	449.629.800,00

1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	440,00	100.000.000,00	APBD	440,00		75.000.000,00
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik yang disediakan	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	150,00	60.000.000,00	APBD	150,00		70.000.000,00
1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1,00	19.999.800,00	APBD	1,00		19.999.800,00
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	30,00	9.630.000,00	APBD	30,00		9.630.000,00
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	15,00	200.000.000,00	APBD	15,00		200.000.000,00
1.5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	-	75.000.000,00	APBD	-		75.000.000,00
1,6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	12,00	150.000.000,00	APBD	12,00		100.000.000,00
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan gedung kantor	Kab.Kutai Kartanegara	12,00	75.000.000,00	APBD	12,00		50.000.000,00
1.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Pagar Balai Penyuluhan KB	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	12,00		APBD	12,00		
1.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan sarana prasarana gedung kantor	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	12,00	75.000.000,00	APBD	12,00		50.000.000,00

1,7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	11,00	1.620.032.308,00	APBD	11,00	2.191.032.308,00
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	160,00	200.000.000,00	APBD	160,00	200.000.000,00
1.7.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1,00	75.000.000,00	APBD	1,00	200.000.000,00
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong		1.345.032.308,00	APBD		1.791.032.308,00
1,8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1,00	207.901.578,00	APBD	1,00	195.853.578,00
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1,00	60.000.000,00	APBD	1,00	70.000.000,00
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1,00	97.901.578,00	APBD	1,00	75.853.578,00
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya uang dipelihara / direhabilitasi	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	6,00	50.000.000,00	APBD	6,00	50.000.000,00

				-			-	
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK		80,00	1.346.540.000,00		80,00	550.000.000,00
		Tersedianya dokumen grand design kependudukan						
2,1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dalam pengendalian kuantitas penduduk	Kutai Kartanegara	1,00	300.000.000,00	APBD	1,00	125.000.000,00
2.1.1	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat	Dokumen grand design	Kutai Kartanegara	100,00		APBD	100,00	
2.1.2	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	Kutai Kartanegara	10.000,00	75.000.000,00	APBD	10.000,00	50.000.000,00
2.1.3	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Tersedianya Materi Pendidikan dan Kependudukan	Kutai Kartanegara	43,00	75.000.000,00	APBD	43,00	
2.1.4	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kutai Kartanegara		75.000.000,00	APBD		75.000.000,00
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kutai Kartanegara	1,00	75.000.000,00	APBD	1,00	
2,2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara	Kutai Kartanegara	5,00	1.046.540.000,00	APBD	5,00	425.000.000,00
2.2.1	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kutai Kartanegara	5,00	150.000.000,00	APBD	5,00	150.000.000,00
2.2.2	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kutai Kartanegara	2,00	100.000.000,00	APBD	2,00	100.000.000,00
2.2.3	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		Kutai Kartanegara	1,00	225.000.000,00	APBD	1,00	175.000.000,00

	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kutai Kartanegara	106.428	571.540.000,00				
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Pemakaian CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun		3,00	1.915.000.000,00		3,00	1.057.000.000,00
		Angka peserta KB Baru		108,00			108,00	
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)		18,00			18,00	
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		237,00			237,00	
		Persentase Angka Drop Out Akseptor		237,00			237,00	
3,1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	Terlaksananya kegitaan advokasi dan KIE	Kutai Kartanegara	69,00	760.000.000,00	APBD	69,00	485.000.000,00
3.1.1	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kutai Kartanegara	237,00	260.000.000,00	APBD	237,00	260.000.000,00
3.1.2	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kutai Kartanegara		100.000.000,00	APBD	40,00	75.000.000,00
3.1.3	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik serta media luar ruang				100.000.000,00	APBD		75.000.000,00

3.1.4	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya LokalPromosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kutai Kartanegara	40,00	300.000.000,00	APBD	40,00	75.000.000,00
3.1.5	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan Jumlah Media Yang Digunakan	Kutai Kartanegara	700,00		APBD	700,00	
3,2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya kegiatan operasional KB di Lapangan	Kutai Kartanegara	400,00	280.000.000,00	APBD	400,00	172.000.000,00
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah IMP yang dibina	Kutai Kartanegara	237,00	50.000.000,00	APBD	237,00	72.000.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	130.000.000,00			
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah sarana pendukung	Kutai Kartanegara	69,00	100.000.000,00	APBD	69,00	

3.2.1	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PKB/PLKB	Kutai Kartanegara	70,00		APBD	70,00	100.000.000,00
3,3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya alat, obat dan kontasepsi pada Fasilitas Kesehatan	Kutai Kartanegara	38,00	425.000.000,00	APBD	38,00	225.000.000,00
	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kutai Kartanegara	12,00	100.000.000,00			
3.3.1	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Alat dan obat kontrasepsi	Kutai Kartanegara	60,00	75.000.000,00	APBD	60,00	75.000.000,00
3.3.2	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Akseptor (unmet need) yang terlayani	Kutai Kartanegara	60,00	150.000.000,00	APBD	60,00	150.000.000,00
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,00	100.000.000,00	APBD		
3,4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan ORMAS / POKJA yang terlibat dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Kutai Kartanegara	69.78 80.93 59.36 5,00 77.78 64.65	450.000.000,00	APBD	69.78 80.93 59.36 5,00 77.78 64.65	175.000.000,00
3.4.1	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kegiatan sosialisasi	Kutai Kartanegara	35,75	100.000.000,00	APBD	35,75	100.000.000,00
3.4.2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Persentase Kampung KB Bernilai Baik	Kutai Kartanegara Kab. Kutai Kartanegara, Semua	30,00	100.000.000,00	APBD	30,00	75.000.000,00

	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) dikampung berkwalitas	Jumlah DASHAT Dikampung KB	Kecamatan, Semua Kel/Desa Kutai Kartanegara	20,00	100.000.000,00			
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB		2,00	150.000.000,00			
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB		150,00	2.415.000.000,00		150,00	1.125.000.000,00
		Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB		2,00			2,00	
		Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB		1,00			1,00	
		Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan		70,00			70,00	
		Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa		4,00			4,00	
		Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri		42,00			42,00	
4,1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan pembinaan kelompok ketahanan dan	Kutai Kartanegara		1.875.000.000,00	APBD		775.000.000,00

		kesejahteraan keluarga							
4.1.1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Apseptor (UPPKA)	Jumlah penyediaan sarana kelompok	Kutai Kartanegara	55,00	200.000.000,00	APBD		150.000.000,00
4.1.2	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Apseptor (UPPKA)	Orang dalam kelompok	Kutai Kartanegara	930,00	500.000.000,00	APBD		150.000.000,00
4.1.3	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Apseptor (UPPKA)	Jumlah kelompok	Kutai Kartanegara	394,00	600.000.000,00	APBD		300.000.000,00
4.1.4	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Apseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialiasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB,BKL,BKR,PIK R,PPPKS,Pemberdayaan Ekonomi	Kutai Kartanegara	10,00	75.000.000,00	APBD		50.000.000,00
4.1.5	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga Apseptor UPPKA)dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialiasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua hebat Generasi Berencana	Kutai Kartanegara	60,00	225.000.000,00	APBD		75.000.000,00
4.1.6	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Dokumen Kebijakan	Kutai Kartanegara			APBD		50.000.000,00
	Pembentukan Kelompok dan Kesejahteraan BKB,BKR Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK- R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kutai Kartanegara	50,00	275.000.000,00		50,00	

	(UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)							
4,2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi	Kutai Kartanegara		540.000.000,00	APBD		350.000.000,00
4.2.1	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kutai Kartanegara	4,00	150.000.000,00	APBD		100.000.000,00
4.2.2	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kutai Kartanegara	68,00	215.000.000,00	APBD		150.000.000,00
4.2.3	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kutai Kartanegara	68,00	175.000.000,00	APBD		100.000.000,00
					17.637.814.818,00			15.200.954.484,00

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan salah satu rencana pencapaian kinerja tahun Ke-5 (Lima) urusan wajib bukan pelayanan dasar dengan Indikator Kinerja Utama adalah:

Indikator Kineja Utama (IKU)
Nilai Akuntanbilitas Kinerja DPPKB
Angka Total Fertility Rate (TFR) per WUS (15-49 tahun)
Indek Pembangunan Keluarga

RencanaKerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembagunan Daerah(RKPD) Tahun 2025. Proses penyusunan RKPD Tahun 2024 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah.

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian:
    1. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu melakukan perhitungan Indeks Pembangunan Keluarga.
    2. Angka Total Fertility Rate (TFR) dipengaruhi oleh beberapa indikator yaitu:
        a) Angka Pemakaian CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun.
        b) Angka peserta KB Baru.
        c) Angka unmetneed
        d) Penggunaan MKJP
        e) Persentase angka drop-out akseptor
3. Kurang nya sarana dan prasarana pelayanan dalam menunjang kegiatan baik untuk pelayanan internal maupun pelayanan eksternal terkait dengan tugas dan fungsi OPD serta sarana prasarana kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

4. Jumlah tenaga PKB/PLKB yang jauh dari ideal, sekitar 5 Desa dibina oleh satu orang PKB/PLKB sedangkan yang idealnya 1 atau 2 Desa di bina oleh1orang PKB/PLKB.
5. Percepatan Penurunan STUNTING di wilayah LOKUS STUNTING masih tinggi.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi RENJA merupakan hal penting yang perlu di upayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistic yang di emban oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi RENJA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

c. Rencana tindak lanjut

Sasaran yang ingin di capai dalam kurun waktu satu tahun kedepan merupakan penjabaran dari prioritas tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan unit kerja perlu di tetapkan program tahunan, yaitu sebagaimana tersebut yang di tuangkan dalam Rencana Kerja Dinas Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

Untuk mewujudkan tujuan pencapaian tingkat kinerja di atas tidak dapat di laksanakan melalui suatu kegiatan yang bersamaan, tetapi harus melalui tahapan yang berkesinambungan. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut yang menjadi sarana prioritas adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Rencana Kerja (RENJA) OPD Dinas Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Kutai Kartanegara, disusun berdasarkan program dan kegiatan pada bidang-bidang teknis dan usulan dari hasil musrenbang kabupaten. Penyempurnaan metrik RENJA OPD bertujuan untuk mewujudkan alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indicator kinerjanya. Oleh karena itu, subtansi dari penyusunan rencana kerja tahunan adalah target dan pencapaian indicator kinerja.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KabupatenKutai Kartanegara Tahun 2025 disampaikan, sebagai acuan dan di jadikan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan serta sebagai alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan, efesiensi belanja dana kuntabilitas kinerja Pemerintah.

q.RENJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) Tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima Tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2025 mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Dalam hal keterkaitan dengan program pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), DBON merupakan program Pembangunan Olahraga Jangka Panjang 2021-2045 yang mencakup : olahraga pendidikan, olahraga masyarakat dan olahraga prestasi. Salah satu target dari DBON yakni Indonesia mampu meraih prestasi terbaik di Olimpiade 2044. Selain itu juga keterkaitan dalam bidang kepemudaan yaitu Pengembangan kepemudaan dengan meningkatkan kreatifitas pemuda guna mengurangi pengangguran ditingkat pemuda.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
d. Perumusan rancangan akhir; dan
e. Penetapan.

Dalam penyusunannya Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dilandasi dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang.Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional/ DBON (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

18. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 55 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 55);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat dijadikan sebagai acuan perencanaan jangka pendek serta menjadi indikator dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian Renja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban (akuntabilitas) Instansi Pemerintah Daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga secara terpadu dan terintegrasi dengan sektor lain dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan Pemuda dan Olahraga di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

1.4 Sistematika Penulisan

Sistimatika penulisan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan

Organisasi Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran organisasi Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD Tahun lalu (Tahun n-2/2023) dan perkiraan capaian Tahun berjalan (Tahun n-1/2024), mengacu pada APBD Tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja-PD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD Tahun-Tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja-PD Tahun lalu, dan realisasi Renstra-PD mengacu pada hasil laporan kinerja Tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasiprogram/kegiatanyang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Berisi uraian tentang :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

a) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah,
b) Pencapaian SDGs,

c) Pengentasan Kemiskinan,

d) Pencapaian SPM,

e) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,

f) Dan sebagainya.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah Program dan jumlah kegiatan
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dana pa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total Kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Tabel

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah, dan nama, tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD.

Evaluasi kegiatan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2023 didasarkan pada pencapaian output (keluaran) dari masing-masing kegiatan yang selanjutnya digunakan untuk melihat pencapaian sasaran program. Hasil evaluasi program dan kegiatan Tahun 2023 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara memperlihatkan bahwa pencapaian kinerja Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan Dan Olahraga memperoleh hasil yang sangat memuaskan, pencapaiannya sesuai dengan apa yang direncanakan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Dinas kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Dinas kepemudaan Dan Olahraga s/d Tahun 2024

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahaal Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan (Output)	Targent Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja-PD Tahun 2023	Realisasi Renja-PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11(10/4)
219.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	82.12	72	85.50	118.75	86.00	86	111.69
219.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	484	6	118	9	7.63	118	118	24.38
219.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	7	5	6	120.00	5	5	16.67
219.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	140	-	35	-	0.00	35	35	25.00

219.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	80	-	20	-	0.00	20	20	25.00
219.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	140	-	35	-	0.00	35	35	25.00
219.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	80	-	20	-	0.00	20	20	25.00
219.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	-	2	-	0.00	2	2	22.22
219.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	3	1	3	300.00	1	1	20.00
219.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	472		71	71	100.00	71	71	15.04
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6,624	928	1,104	1,104	100.00	1,104	1,104	16.67
2.19.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	91	-	1	-	0.00	1	1	1.10
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	-	1	3	300.00	1	1	25.00
2.19.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	40	-	10	-	0.00	10	10	25.00

2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	165	20	30	32	106.67	30	30	18.18
2.19.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	-	1	-	0.00	1	1	25.00
219.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	92	12	17	12	70.59	17	17	18.48
219.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8	-	2	-	0.00	2	2	25.00
219.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	8	-	2	3	150.00	2	2	25.00
219.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	72	12	12	9	75.00	12	12	16.67
219.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	-	1	1	100.00	1	1	25.00
219.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	8	-	2	2	0.00	2	2	25.00
219.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4	-	1	-	0.00	1	1	25.00
219.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	-	1	2	200.00	1	1	25.00
219.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	37	5	7	7	100.00	7	7	18.92
219.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	680	-	170	697	410.00	170	170	25.00

219.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	-	1	2	200.00	1	1	25.00
219.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24	4	4	3	75.00	4	4	16.67
219.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	160	20	40	340	850.00	40	40	25.00
219.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48	8	8	8	100.00	8	8	16.67
219.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	4	4	5	125.00	4	4	16.67
219.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	204	34	34	33	97.06	34	34	16.67
219.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	120	20	20	35	175.00	20	20	16.67
219.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9,000	1,014	1,500	1,504	100.27	1,500	1,500	16.67
219.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	210	34	30	32	106.67	30	30	14.29
219.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,570	169	300	303	101.00	300	300	19.11
219.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2,700	900	450	900	200.00	450	450	16.67
219.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10	2	2	8	400.00	2	2	20.00
219.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Barang Milik Daerah	47	7	8	93	1162.50	8	8	17.02

	Urusan Pemerintah Daerah									
219.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42	18	7	80	1142.86	7	7	16.67
219.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5	-	1	13	0.00	1	1	20.00
219.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	72	12	12	12	100.00	12	12	16.67
219.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	12	12	12	100.00	12	12	16.67
219.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	12	12	12	100.00	12	12	16.67
219.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	18.30	3.08	3.08	3.08	100.00	3.08	3.08	16.83
219.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	180	24	30	41	136.67	30	30	16.67
219.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	117	18	20	20	100.00	20	20	17.09
219.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12	4	2	16	800.00	2	2	16.67
219.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	1	1	8	800.00	1	1	16.67
219.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan Kepemudaan	81.71	71.95	74.39	74.39	100.00	76.83	76.83	94.03

219.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Kepemudaan	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
219.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	140	100	30	12	40.00	30	30	21.43
219.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	420	100	80	805	1006.25	80	80	19.05
219.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	300	100	40	61	152.50	40	40	13.33
219.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	500	100	100	101	101.00	100	100	20.00

219.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melaluiImplementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1,600	200	300	300	100.00	300	300	18.75
219.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	22	11	4	61	1525.00	4	4	18.18
219.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	45	11	10	10	100.00	10	10	22.22
219.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan,Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	100	20	20	20	100.00	20	20	20.00
219.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	372	62	62	126	203.23	62	62	16.67
219.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	63.41	43.90	48.78	48.78	100.00	53.66	53.66	84.62
219.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	260	1	40	75	187.50	40	40	15.38

219.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	15	2	1	9	900.00	1	1	6.67
219.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Berolahraga	35.85	34.14	34.20	34.20	100.00	34.66	34.66	96.70
219.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi	21.05	17.54	21.05	21.05	100.00	21.05	21.05	100.00
219.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	180	20	40	40	100.00	40	40	22.22
219.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	69	27	9	108	1200.00	9	9	13.04
219.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Kejuaraan olahraga	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
219.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	12	2	2	7	350.00	2	2	16.67
219.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	5	1	1	1	100.00	1	1	20.00
219.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam	7	2	1	4	400.00	1	1	14.29

	Penyelenggaraan Kejuaraan	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan								
219.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Atlet Lokal Yang Dibina	54.67	42.61	46.45	46.45	0.00	48.75	48.75	89.18
219.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	462	100	100	300	300.00	100	100	21.65
219.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	228	18	52	66	126.92	52	52	22.81
219.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	400	40	80	126	157.50	80	80	20.00
219.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	800	20	800	1,185	148.13	-	-	0.00
219.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	5	1	1	1	100.00	1	1	20.00
219.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan Organisasi Keolahragaan	3.51	10.53	3.51	3.51	100.00	3.51	3.51	100.00
219.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	16	7	2	31	1550.00	2	2	12.50
219.03.2.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	6	4	1	1	100.00	1	1	16.67
219.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase masyarakat yang berolahraga	0.0095	0.0068	0.0082	0.0082	100.00	0.0095	0.0095	100.00

219.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	18	8	3	31	1033.33	3	3	16.67
219.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	5	3	1	5	500.00	1	1	20.00
219.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	21	1	5	21	420.00	5	5	23.81
219.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	9	1	2	3	150.00	2	2	22.22
219.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	350	30	80	80	100.00	80	80	22.86
219.04	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan pembinaan kepramukaan	100	100	100	100	100	100	100	100.00
219.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	15.61	10.61	11.86	11.86	100.00	13.11	13.11	84.00
219.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	5	16	1	2	200.00	1	1	20.00
219.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	5	1	1	1	100.00	1	1	20.00
219.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	320	20	60	60	100.00	60	60	18.75
219.04.2.01.04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan	9	20	2	2	100.00	2	2	22.22

	Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas								
219.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	20	5	3	3	100.00	3	3	15.00
219.04.2.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	13	1	3	3	100.00	3	3	23.08
219.04.2.01.07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	9	1	2	2	100.00	2	2	22.22
219.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	30	5	5	4	80.00	5	5	16.67

Berdasarkan tabel T-C.29 Capaian Indikator program Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 85.50;
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 74,39 %;
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 34,20 %;
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 100%.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja pelaksanaan progam/kegiatan serta untuk meminimalisir implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah

1. Terhadap indikator program yang tidak tercapai akan ditindak lanjuti dengan peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Penyesuaian nomenklatur program/kegiatan serta indikator dan target kinerja menyesuaikan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
3. Penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 55 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
4. Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara berkala;
5. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang direncanakan;
6. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan unit kerja bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanaan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan Dab Olahraa Kabupaten Kutai Kartanrgara didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			70	72	74	75	77	82	85	86	87	
2	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6	118	118	118	118	6	118	118	118	
3	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			43	71	71	71	71	43	71	71	71	
4	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			12	17	17	17	17	12	17	17	17	
5	Jumlah Dokumen			0	2	2	2	2	0	2	2	2	
6	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			5	7	7	7	7	5	7	7	7	
7	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			8	8	8	8	8	8	8	8	8	
8	Jumlah Barang Milik Daerah			7	8	8	8	8	7	8	8	8	
9	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	

10	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			3.08%	3.08%	3.08%	3.08%	3.08%	3.08%	3.08%	3.08%	3.08%	
11	Persentase Pengembangan Kepemudaan			71.95%	74.39%	76.8%	79.27%	81.71%	71.95%	74.39%	76.8%	79.27%	
12	Persentase Pembinaan Kepemudaan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif			43.90%	48.78%	53.66%	58.54%	63.41%	43.90%	48.78%	53.66%	58.54%	
14	Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Berolahraga			34.14%	34.20%	34.66%	35.41%	35.85%	34.14%	34.20%	34.66%	35.41%	
15	Persentase Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi			17.54%	21.05%	21.05%	21.05%	21.05%	17.54%	21.05%	21.05%	21.05%	
16	Persentase pelaksanaan Kejuaraan olahraga			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	Persentase Atlet Lokal Yang Dibina			42.61%	46.45%	48.75%	52.50%	54.67%	42.61%	46.45%	48.75%	52.50%	
18	Persentase Pembinaan Organisasi Keolahragaan			10.53%	3.51%	3.51%	3.51%	3.51%	10.53%	3.51%	3.51%	3.51%	
19	Persentase masyarakat yang berolahraga			0.0068%	0.0082%	0.0095%	0.0095%	0.0095%	0.0068%	0.0082%	0.0095%	0.0095%	
20	Cakupan pembinaan kepramukaan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
21	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif			9.36%	11.86%	13.11%	14.36%	15.61%	9.36%	11.86%	13.11%	14.36%	
22	Persentase Pemuda Mandiri		IKK	0,27%	0.29%	0.30%	0.31%	0.32%	0,27%	0.29%	0.30%	0.31%	
23	Persentase Pemuda yang Berorganisasi		IKK	4,78%	4,81%	4,84%	4,87%	5%	4,78%	4,81%	4,84%	4,87%	
24	Jumlah Prestasi Olahraga		IKK	5	6	7	8	9	5	6	7	8	

Dari Tabel tersebut dapat dilihat data Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara beserta angka target yang akan dicapai selama periode 1 (satu) Tahun sesuai Rencana Kerja Tahunan. Target Tahunan tersebut kemudian diakumulasi menjadi target perencanaan pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) Tahun. Adanya kenaikan target yang terjadi antar Tahun mengindikasikan bahwa dalam perencanaan pembangunan harus ada peningkatan. Peningkatan yang direncanakan dapat memberikan gambaran adanya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan. Dengan adanya Indikator Kinerja tersebut arah pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana dan hasil pembangunan berupa outcome dan benefit dapat diukur akuntabilitasnya. Dengan capaian kinerja yang akuntabel, maka diharapkan hasil kinerja benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Terkait dengan indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. lahirnya pemuda yang berkarakter dan berdaya saing untuk dapat memberikan dan mengembangkan potensinya sehingga dapat mengambil bagian penting dan berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemuda-pemuda yang berkarakter dan berdaya saing tersebut merupakan hasil jerih payah proses pembinaan terhadap pemuda yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Adanya atlet pelajar yang berprestasi ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara yang dimulai dari program pembibitan atau talent scouting bagi atlet pelajar dan penyandang disabilitas untuk berprestasi di bidang olahraga.
3. Nilai evaluasi implementasi SAKIP yang meningkat salah satunya disebabkan karena pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga hal tersebut menunjukkan bahwa dinas kepemudaan dan olahraga telah melakukan perbaikan dan atau tindakan korektif secara signifikan baik berdasarkan rekomendasi inspektorat daerah maupun hasil evaluasi yang

dilakukan secara internal oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya perbaikan yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

4. Atlet berprestasi melampaui target dapat di lihat dari perolehan medali pada kejuaraan single event maupun multi event baik kejuaraan tingkat nasional dan internasional.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora.

Permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora sebagaimana tabel diatas, yaitu :

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara :
    1) Urusan Pemuda, pelayanan kepemudaan belum optimal mengingat banyaknya jumlah pemuda dengan berbagai permasalahan pemuda di Kabupaten Kutai Kartanegara belum dapat tertangani secara optimal. Hal ini disebabkan :
        a. Terbatasanya jumlah kegiatan bila dibandingkan dengan jumlah pemuda dan luasnya cakupan wilayah pembinaan yang tersebar di 18 Kecamatan
        b. Kegiatan kepemudaan dirasakan masih minim dikarenakan tidak semua anggaran kegiatan khusus kepemudaan menyentuh ke beberapa wilayah di kecamatan/desa;
        c. Kelangkaan prasarana Gedung Kepemudaan membuat aktivitas pemuda belum terakomodir melalui kegiatan/kreativitas pembinaan dalam ruang
        d. Prestasi Pemuda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya

khususnya pada keikutsertaan kegiatan pemuda tingkat provinsi dan nasional, namun tidak semua bisa terakomodir pemuda-pemudi yang mempunyai talenta maupun prestasi dikarenakan terbatasnya anggaran kegiatan yang disediakan.

2) Urusan Keolahragaan, Pelayanan keolahragaan dari Tahun 2023 mulai menunjukkan peningkatan setelah beberapa Tahun terpuruk dikarenakan adanya pandemi covid-19 sehingga beberapa penyelenggaraan/even mulai dari tingkat nasional maupun internasional mulai diadakan.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara.

Keterbatasan kebijakan pelayanan Pemuda di Kabupaten Kutai Kartanegara karena ada beberapa kegiatan terutama pada Pelatihan Kewirausahaan yang juga berkaitan dengan program/Kegiatan OPD lainnya seperti Disnakertrans dan juga Disperindakop, sama halnya dengan kegiatan Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda berkaitan juga dengan program yang ada pada BNN.

Secara struktur organisasi, saat ini DISPORA telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi yang disyaratkan. Setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan dalam menyusun perencanaan program kegiatan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. DiTahun berikutnya diharapkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab.Kutai Kartanegara bisa meningkatkan kapasitas baik dari kecepatan, ketepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana pada Program di Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SDGs (Sustainable Development Goals).

Sesuai dengan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025,dan juga visi Kepala Daerah Terpilih Kab.Kutai Kartanegara yaitu : *Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Bahagia.*

Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, maka disusunlah misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki,maka ditetapkan 5 (Lima) misi sebagai berikut:

1. Memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya;
3. Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Meningkatkan kwalitas layanan Infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah;
5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;

Dampaknya terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SDGs (Sustainable Development Goals) yaitu :

a. Kegiatan P4GN (Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) melalui kegiatan Penyululuhan Pencegahan, Penangulangan Penyalahgunaan Narkoba dengan sasaran kalangan pelajar SMP/MTs/SMA/SMK/MA. dengan peserta 100 orang.
b. Standar Pelayanan Minimal pada Dispora telah Aplikasi Simpora (sistem peminjaman sarana dan Prasarana Olahraga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya mempermudah dalam pelayanan sarana dan Prasarana Olahraga
c. Melaksanakan urusan keolahragaan melalui kegiatan prioritas pembangunan prasarana olahraga indor dan outdor di Kecamatan dan bersekala nasional berupa Komplek Olahraga

areal Stadion Aji Imbut Kecamatan Tenggarong Seberang dan Komplek Olahraga Stadion Rondong Demang di Tenggarong.

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara.

1) Tantangan :

a. Tantangan internal Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara

1) Sebagian besar staf/pelaksana dengan latar belakang atlet sehingga perlu terus dilakukan sosialisasi dan pembinaan berkaitan administrasi
2) Belum /masih kurangnya gagasan yang dituangkan dalam bentuk konsep dan informasi.

b. Tantangan eksternal.

1) Jumlah pemuda yang meningkaat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
2) Luasnya wilayah pembinaan pemuda
3) Penanganan Pemuda belum tertangani secara optimal
4) Tingkat pengguna narkoba dikalangan pemuda maupun remaja harus didukung dengan data di masing-masing kecamatan dan juga BNN.
5) Masih kurangnya atlet berprestasi
6) Kurangnya fasilitas olahraga indor milik pemerintah dan swasta
7) Kurangnya fasilitas ruang terbuka untuk kegiatan pemuda dan olahraga
8) Kurangnya data yang diperoleh terkait jumlah orang/atlit ataupun persentase pada Program/kegiatan.
9) Kurangnya wadah bagi pemuda dalam hal melatih dan membentuk pemuda mandiri.

2) Peluang :

a. Luasan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
b. Adanya induk organisasi kepemudaan KNPI Kabupaten Kutai Kartanegara
c. Banyak jumlah organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat yang farsial

d. Adanya wadah bagi pemuda dalam membentuk pemuda yang mandiri melalui Klinik WPM
e. Banyaknya jumlah usia muda /pelajar
f. Adanya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah
g. Adanya Organisasi Olahraga, KONI Kabupaten Kutai Kartanegara
h. Adanya partisifasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan prasarana olahraga.
i. Adanya partisipasi masyarakat, insan olahraga dalam pengembangan minat, bakat dan prestasi olahraga di Kabupaten Kutai Kartanegara.
j. Adanya pembinaan terhadap pemuda.

e. Formulasi isu-isu penting berupa Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas Tahun yang direncanakan.

Pada Tahun 2020-2030 Indonesia berpeluang menikmati the window of opportunity sebagai berkah dari bonus demografi, dengan syarat didukng oleh Sumber Daya Manusia usia produktif yang berkualitas dan berkapasitas. Pembangunan pemuda memiliki peran penting untuk mewujudkan the window of opportunity, yaitu dengan menyiapkan pemuda yang berkualitas dan berkapasitas.

Peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai salah satu bagian dari Bangsa Indonesia harus mengambil peran penting, khususnya dalam pengembangan pemuda dan memajukan olahraga, guna memberikan kontribusi terhadap penyelesaian permasalahan yang ada dan memberikan sumbangsih solusi terbaik untuk dapat menempatkan Bangsa Indoensia menjadi pemain utama didalam kawasan perdagangan bebas ASEAN. Untuk itu, dalam proses penyusunan Rencana Kerja perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembangan, antara lain:

1. Peningkatan daya saing tenaga kerja pemuda di pasaran dan dunia kerja

   Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2023 sekitar 788.113 juta jiwa, dan sekitar

195.187 persennya (195.187 juta jiwa) adalah penduduk berusia 16-30 Tahun. Jumlah ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sumber daya manusia pemuda yang cukup besar sebagai penggerak pembangunan. Daya saing pemuda di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak lepas dari tingkat pendidikan yang ditamatkan pemuda. Jumlah pemuda tersebut merupakan tantangan bagi daya saing pemuda di era globalisasi tenaga kerja

2. Advokasi terhadap organisasi kepemudaan

   Peran organisasi kepemudaan belum optimal dalam pelayanan kepemudaan. Sebagian besar organisasi kepemudaan fokus di bidang politik, sedangkan bidang lain belum banyak digarap, antara lain; kewirausahaan, kepedulian dan kepeloporan. Disamping itu banyak organisasi kepemudaan yang belum mencukupi syarat legalitas sesuai dengan UU No.40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

3. Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga

   budaya olahraga dimasyarakat belum optimal dan Masih Kurangnya Pembangunan Sarana dan Prasarana terbuka (Prestasi, Tradisional, Rekreasi, Wisata, Tantangan dan Pertualangan) yang mudah diakses oleh masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang berpola hidup sehat.

4. Masih lemahnya manajemen Keolahragaan

   Manajemen keolahragaan masih relatif lemah, sehingga tidak mampu mendorong pengembangan aktivitas olahraga didalam masyarakat. Sistem dan manajemen keolahragaan masih terkotak-kotak, semua unsur yang terlibat dalam olahraga belum terpadu.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan teradap rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dengan membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dispora dan

tingkat kinerja yang dicapai oleh Dispora, Adapun perbandingan antara Rancangan Awal RKPD 2025 dengan Hasil analisis Kebutuhan 2025 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Untuk kegiatan yang telah mengalami penambahan dan pengurangan pagu anggaran maupun penyesuaian target capaian kinerja Sub Kegiatan antara lain adalah :
    a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pada kegiatan ini telah terjadi penambahan pagu anggaran yang semula Rp800.000.000 pada menjadi Rp1.000.000.000 ini dikarenakan adanya sub kegiatan baru sehingga menyesuaian target yang semula 12 dokumen kini menjadi 16 Dokumen.
    b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel, pada kegiatan ini telah terjadi penambahan pagu anggaran yang semula Rp11,208,348,906 pada menjadi Rp11,919,065,226 ini dikarenakan adanya sub kegiatan baru sehingga menyesuaian target yang semula 71 dokumen kini menjadi 72 Dokumen.
    c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, pada kegiatan ini mengalami pengurangan pagu anggaran yang semula Rp100,000,000 kini menjadi Rp80,000,000 ini dikarenakan adanya efisiensi belanja pada kegiatan tersebut.
    d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pada kegiatan ini telah terjadi penambahan pagu anggaran yang semula Rp850,000,000 pada menjadi Rp2,600,000,000 ini dikarenakan peningkatan kebutuhan atas barang milik daerah guna menunjang urusan pemerintah sehingga terjadi penyesuaian target yang semula 10 unit kini menjadi 14 Unit.
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Untuk kegiatan yang telah mengalami penambahan dan pengurangan pagu anggaran maupun penyesuaian target capaian kinerja Sub Kegiatan antara lain adalah :

a) Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, pada kegiatan ini telah terjadi penambahan pagu anggaran yang semula Rp3,500,000,000 pada menjadi Rp7,725,000,000 ini dikarenakan adanya penyesuaian target capaian guna mendukung program dedikasi kukar idaman.

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan,
   a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, pada kegiatan ini telah terjadi penambahan pagu anggaran yang semula Rp1,400,000,000 pada menjadi Rp2,150,000,000 hal ini dikarenakan mengakomodir usulan dari masyarakat kutai kartanegara.
   b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, pada kegiatan ini telah terjadi penambahan pagu anggaran yang semula Rp600,000,000 pada menjadi 3,750,000,000 hal ini dikarenakan adanya event pekan olahraga pelajar daerah yang di laksanakan di kabupaten Paser.
   c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, pada kegiatan ini telah terjadi penambahan pagu anggaran yang semula Rp3,750,000,000 pada menjadi 5,450,000,000 hal ini dikarenakan untuk mendukung atlet dalam persiapan menghadapi pekan olahraga provinsi.
   d. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi, pada kegiatan ini telah terjadi penambahan pagu anggaran yang semula Rp4,000,000,000 pada menjadi Rp6,450,000,000 hal ini dikarenakan untuk mendukung program dedikasi kukar idaman dalam event olahraga rekreasi.

Adapun detail uraian diatas dapat dilihat dalam tabel Tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
219.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72	23,477,575,305	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72	26,088,291,625	
219.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	800,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	1,000,000,000	
219.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	400,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	450,000,000	Tambahan Paket Pekerjaan
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	50,000,000	Sub Kegiatan Baru
2.19.01.2.01.0008	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata			PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata	1	50,000,000	Sub Kegiatan Baru

	STATISTIK SEKTORAL DAERAH		Pendukung Statistik Sektoral Daerah			STATISTIK SEKTORAL DAERAH		Pendukung Statistik Sektoral Daerah			
2.19.01.2.01.0009	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Tenggarong Seberang	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Tenggarong Seberang	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	250,000,000	Sub Kegiatan Baru
2.19.01.2.01.0010	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Tenggarong Seberang	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Tenggarong Seberang	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	50,000,000	Sub Kegiatan Baru
219.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	400,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	150,000,000	Penyesuaian Paket Pekerjaan
219.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	71	11,208,348,906	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	72	11,919,065,226	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1104	10,813,348,906	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1104	11,519,065,226	Penyesuaian oleh BPKAD
2.19.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	45,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	25,000,000	Penyesuaian Paket Pekerjaan
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	42	350,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	42	350,000,000	SESUAI

			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD					Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD			
2.19.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	25,000,000	Sub Kegiatan Baru
219.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	16	100,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	17	80,000,000	
2.19.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	50,000,000	Sub Kegiatan Baru
219.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16	100,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16	30,000,000	Penyesuaian Paket Pekerjaan
219.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen	2	50,000,000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen	1	20,000,000	
2.19.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	10,000,000	Sub Kegiatan Baru
219.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2	50,000,000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	10,000,000	Penyesuaian Paket Pekerjaan
219.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	7	275,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	7	275,000,000	

219.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	25,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	25,000,000	SESUAI
219.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	50,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	50,000,000	SESUAI
219.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tenggarong Seberang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	100,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tenggarong Seberang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	100,000,000	SESUAI
219.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	40	100,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	40	100,000,000	SESUAI
219.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10	1,095,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10	1,095,000,000	
219.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	70,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	70,000,000	SESUAI
219.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34	120,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34	120,000,000	SESUAI
219.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	45,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	45,000,000	SESUAI

219.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1500	100,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1500	100,000,000	SESUAI
219.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30	45,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30	45,000,000	SESUAI
219.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	70,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	70,000,000	SESUAI
219.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	100,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	100,000,000	SESUAI
219.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	400,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	400,000,000	SESUAI
219.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	450	45,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	450	45,000,000	SESUAI
219.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	100,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	100,000,000	SESUAI
219.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Barang Milik Daerah	10	850,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Barang Milik Daerah	14	2,600,000,000	
219.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong Seberang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	2	450,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong Seberang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	6	2,200,000,000	Tambahan Untuk penambahan unit kendaraan

			Dinas Jabatan yang Disediakan					Dinas Jabatan yang Disediakan			
219.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	200,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	200,000,000	SESUAI
219.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	200,000,000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	200,000,000	SESUAI
219.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	5,518,189,164	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	5,518,189,164	
219.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	4,000,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	4,000,000,000	SESUAI
219.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1,518,189,164	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1,518,189,164	SESUAI
219.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3.08	3,581,037,235	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3.08	3,581,037,235	
219.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong Seberang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	300,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong Seberang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	300,000,000	SESUAI
219.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	60,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	60,000,000	SESUAI

219.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2	3,021,037,235	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2	3,021,037,235	SESUAI
219.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	200,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	200,000,000	SESUAI
219.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kutai Kartanegara	Persentase Pengembangan Kepemudaan	74.39	4,350,000,000	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kutai Kartanegara	Persentase Pengembangan Kepemudaan	50.00	7,725,000,000	
219.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Persentase Pembinaan Kepemudaan	100	3,500,000,000	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Persentase Pembinaan Kepemudaan	100	7,725,000,000	
2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi	Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	500	1,450,000,000	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi	Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	5	2,400,000,000	PENAMBAHAN UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS DAN KEMPETENSI ANGKATAN KERJA

	Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota					Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota					
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	80	1,000,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	275	1,275,000,000	PENAMBAHAN UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS DAN KEMPETENSI ANGKATAN KERJA (PROGRAM DEDIKASI)
2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Kutai Kartanegara	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	20	150,000,000	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Kutai Kartanegara	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	20	650,000,000	PENAMBAHAN PEMBERIAN PENGHARGAAN UNTUK MALAM ANUGRAH PADA SAAT PERINGATAN SUMPAH PEMUDA
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	20	200,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	20	1,000,000,000	PENAMBAHAN UNTUK EVEN EVENT KEPEMUDAAN BERUPA SELEKSI MAUPUN MENGIKUTI DI LUAR DAERAH

2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	100	200,000,000	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	370	700,000,000	PENAMBAHAN UNTUK PEMILIHAN DUTA NARKOBA SERTA EVENT KEPEMUDAAN PADA BULAN RAMADHAN
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	30	200,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	60	700,000,000	PENAMBAHAN UNTUK KEGIATAN TAHUNAN SELEKSI DAN MENGIKUTI EVENT PEMUDA PELOPOR
2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	4	300,000,000	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	150	1,000,000,000	PENAMBAHAN PENGADAAN SARANA PRASARAN KEPEMUDAAN DI KECAMATAN
219.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	48.78	850,000,000	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	0.00	0	
219.02.2.02.03	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	500,000,000	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	0	0	TIDAK DIISI PAKET PEKERJAAN DI RPJMD

219.02.2.02.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	40	350,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	60	0	TIDAK DIISI PAKET PEKERJAAN DI RPJMD
219.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Kutai Kartanegara	Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Berolahraga	29.58	11,500,000,000	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Kutai Kartanegara	Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Berolahraga	29.58	19,700,000,000	
219.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kutai Kartanegara	Persentase Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi	21.05	1,400,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kutai Kartanegara	Persentase Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi	21.05	2,150,000,000	
219.03.2.01.05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	7	1,250,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	7	2,000,000,000	MENGAKOMODIR USULAN MUSRENBANG DAN MANDATORY SPENDING INFRASTRUKTUR
219.03.2.01.06	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan	40	150,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan	40	150,000,000	SESUAI

	Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar		Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar			Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar		Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar			
219.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Persentase pelaksanaan Kejuaraan olahraga	100.00	600,000,000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Persentase pelaksanaan Kejuaraan olahraga	100.00	3,750,000,000	
219.03.2.02.04	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1	200,000,000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	4	1,650,000,000	PENAMBAHAN EVENT
219.03.2.02.05	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	1	200,000,000	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	1	200,000,000	SESUAI
219.03.2.02.06	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	1	200,000,000	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	1	1,900,000,000	PENAMBAHAN UNTUK MENGIKUTI POPDA 2025
219.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kutai Kartanegara	Persentase Atlet Lokal Yang Dibina	23.33	3,750,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kutai Kartanegara	Persentase Atlet Lokal Yang Dibina	23.33	5,450,000,000	
219.03.2.03.06	Seleksi Atlet Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100	350,000,000	Seleksi Atlet Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100	350,000,000	SESUAI
219.03.2.03.07	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang	Kutai Kartanegara	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	20	100,000,000	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang	Kutai Kartanegara	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	20	100,000,000	SESUAI

	berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga					berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga					
219.03.2.03.08	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kutai Kartanegara	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	52	3,000,000,000	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kutai Kartanegara	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	52	4,300,000,000	PENAMBAHAN UNTUK PENGADAAN ALAT TANDING ATLET PPLPD
219.03.2.03.9	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	40	200,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	40	600,000,000	PENAMBAHAN UNTUK PELATIHAN LISENSI C
219.03.2.03.10	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1	100,000,000	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1	100,000,000	SESUAI
219.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kutai Kartanegara	Persentase Pembinaan Organisasi Keolahragaan	3.51	1,750,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kutai Kartanegara	Persentase Pembinaan Organisasi Keolahragaan	3.51	1,900,000,000	
219.03.2.04.05	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	5	750,000,000	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1	400,000,000	Penyesuaian Paket Pekerjaan
219.03.2.04.06	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi	1	1,000,000,000	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi	1	1,500,000,000	Penambaha Paket Pekerjaan

	dengan Lembaga Terkait		Keolahragaan Kabupaten/Kota			dengan Lembaga Terkait		Keolahragaan Kabupaten/Kota			
219.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kutai Kartanegara	Persentase masyarakat yang berolahraga	0.0082	4,000,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kutai Kartanegara	Persentase masyarakat yang berolahraga	0.0082	6,450,000,000	
219.03.2.05.06	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	3	200,000,000	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	3	300,000,000	PENAMBAHAN UNTUK FASILITASI INDUK OLAHRAGA TRADISIONAL DAN REKREASI
219.03.2.05.07	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	6	2,500,000,000	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	10	3,250,000,000	PENAMBAHAN UNTUK EVENT EVENT TAHUNAN
219.03.2.05.08	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	80	100,000,000	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	10	500,000,000	Guna Mendukung peningkatan Penyelengaraan Lomba Olahraga Tradisional di Kalangan Masyarakat
219.03.2.05.09	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Kutai Kartanegara	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	5	200,000,000	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Kutai Kartanegara	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	5	400,000,000	Alat Mengikuti Festival Olahraga Rekreasi dan Tradisional Nasional

219.03.2.05.10	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	4	1,000,000,000	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	7	2,000,000,000	PENAMBAHAN UNTUK KEGIATAN OLAHRAGA TRADISIONAL DAN REKREASI
219.04	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Kutai Kartanegara	Cakupan pembinaan kepramukaan	100	2,450,000,000	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Kutai Kartanegara	Cakupan pembinaan kepramukaan	100	2,450,000,000	
219.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kutai Kartanegara	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	11.86	2,450,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kutai Kartanegara	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	11.86	2,450,000,000	
219.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Kutai Kartanegara	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	150,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Kutai Kartanegara	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	150,000,000	SESUAI
219.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	150,000,000	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	150,000,000	SESUAI
219.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	60	200,000,000	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	60	200,000,000	SESUAI
219.04.2.01.04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	2	150,000,000	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	2	150,000,000	SESUAI

219.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	5	750,000,000	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	5	750,000,000	SESUAI
219.04.2.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3	150,000,000	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3	150,000,000	SESUAI
219.04.2.01.07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	2	150,000,000	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	2	150,000,000	SESUAI
219.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	5	750,000,000	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	5	750,000,000	SESUAI
					41,777,575,305					55,963,291,625	

4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2023. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat melalui mekanisme musrenbang tingkat kecamatan dan forum OPD Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan berikut ini :

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besar Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
219.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				
219.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota				
	Pelatihan UMKM Rt.18 Kel. Panji	Tenggarong	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	10 orang	
	Pelatihan rias Pengantin RT 18 Kel. Panji	Tenggarong	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	10 orang	
219.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				
219.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
219.03.2.01.05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota				

	Pengadaan sarana Belajar Tenis Meja	Muara Badak	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	
	fasilitas gedung lapangan futsal, volly	Loa Kulu	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	
	fasilitas gedung lapangan futsal,	Muara Kaman	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	
219.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				
219.03.2.05.10	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional				
	Event Balap Ketinting Desa Embalut	Embalut	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	
	Kegiatan Lomba 17 Agustus Kel. Panji	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	
	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Dokumen	
	Event Olahraga Tradisional dan Rekreasi	Kota Bangun Seberang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 serta rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi guna mengejar target RPJMD 2021-2026, untuk itu tema RKPD 2025 adalah Pemantapan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Akselerasi Dan Transformasi Pembangunan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara mendukung Visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu : “Mewujudkan Masyarkat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berbahagia” dengan program prioritas daerah dan dukungan kegiatan renja perangkat daerah sebagai berikut;

a. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

   Pembangunan dan pengembangan Pusat Layanan Informasi Berbasis Digital

b. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil

   1. Pembangunan dan pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga terbuka (Prestasi, Tradisional, Rekreasi, Wisata, Tantangan dan Pertualangan) yang mudah diakses oleh masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang berpola hidup sehat
   2. pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Industri olahraga
   3. Meningkatkan Budaya Olahraga dimasyarakat
   4. Meningkatkan Kapasitas, Sinergitas dan produktifitas olahraga prestasi nasional

5. Memajukan perekonomian nasional berbasis olahraga

c. Percepatan pembangunan desa dan Kawasan perdesaan pengembangan Potensi Pemuda dengan memanfaatkan keunggulan Lokal dan Berdaya Saing

d. Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja

1. Pengembangan Kewirausahaan dan Menejemen Bisnis Bagi Kaum Muda
2. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota

e. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan

Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

A. Tujuan Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

1. Meningkatkan Tranparansi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
2. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian pemuda dalam pembangunan daerah;
3. Meningkatkan Prestasi dan partisipasi Olahraga;
4. Meningkatkan Gerakan Kepramukaan yang menyentuh Generasi Muda

B. Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tranparansi dan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya keterampilan dan kemandirian pemuda berbasis entreprenuership Serta Peran organisasi kepemudaan dalam peningkatan kualitas anggotanya;
3. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri;
4. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan;

5. Meningkatnya pembinaan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga;
6. Peningkatan prestasi olahraga;
7. Meningkatnya Peran Gerakan Kepramukaan dan keaktifan anggota.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

a) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sesuai dengan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, visi Kab.Kutai Kartanegara yaitu : “ Mewujudkan Masyarkat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berbahagia”

Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, maka disusunlah misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) misi sebagai berikut:

1. Memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan;

b) Dukungan terhadap SDGs terkait dengan kegiatan penyuluhan Narkoba yaitu dengan mengusung tema Pemuda Bersatu dan bangkit begitu juga dengan Rencana Aksi pemerintah sesuai dengan visi RPJPD yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri dan sejahtera sehingga dalam Pengentasan Kemiskinan maka akan tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan hidup yang lestari.

c) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah berupa pelatihan dan keterampilan dibidang kewirausahaan

d) Menciptakan masyarakat yang sehat dengan Pembudayaan olahraga

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan meliputi :

a) Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025
   - Program : 4
   - Kegiatan : 17
   - Sub Kegiatan : 74

b) Sifat penyebaran lokasi dan kegiatan yaitu terletak pada wilayah yang tersebar di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan menitik beratkan pada organisasi pemuda / kepemudaan dan juga pembinaan pemuda dan olahraga. Dalam hal ini diberikan langsung kepada masyarakat guna membantu masyarakat khususnya pemuda dalam mengembangkan minat dalam bidang olahraga dan juga kreatifitas pemuda.

c) Penjelasan jika rumusan program tidak sesuai dengan rancangan RKPD

   Total Kebutuhan Dana / Pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaanya bisa dilihat pada tabel T-C 33 sebagai berikut :

b. Program/Kegiatan yang telah menyesuaikan pagu anggaran adalah sebagai berikut :

   1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Untuk kegiatan yang telah mengalami penambahan dan pengurangan pagu anggaran maupun penyesuaian target capaian kinerja Sub Kegiatan antara lain adalah :

      a) Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, pada kegiatan ini telah terjadi penambahan pagu anggaran yang semula Rp3,500,000,000 pada menjadi Rp7,725,000,000 ini dikarenakan adanya penyesuaian target capaian guna mendukung program dedikasi kukar idaman.

   2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan,

      a) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, pada kegiatan ini telah terjadi penambahan pagu anggaran yang semula

Rp1,400,000,000 pada menjadi Rp2,150,000,000 hal ini dikarenakan mengakomodir usulan dari masyarakat kutai kartanegara.

b) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, pada kegiatan ini telah terjadi penambahan pagu anggaran yang semula Rp600,000,000 pada menjadi Rp3,750,000,000 hal ini dikarenakan adanya event pekan olahraga pelajar daerah yang di laksanakan di kabupaten Paser.

c) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, pada kegiatan ini telah terjadi penambahan pagu anggaran yang semula Rp3,750,000,000 pada menjadi Rp5,450,000,000 hal ini dikarenakan untuk mendukung atlet dalam persiapan menghadapi pekan olahraga provinsi.

d) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi, pada kegiatan ini telah terjadi penambahan pagu anggaran yang semula Rp4,000,000,000 pada menjadi Rp6,450,000,000 hal ini dikarenakan untuk mendukung program dedikasi kukar idaman dalam event olahraga rekreasi.

b) Program/Kegiatan yang telah menambah Sub Kegiatan baru adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pada kegiatan ini telah terjadi penambahan pagu anggaran yang semula Rp800.000.000 pada menjadi Rp1.000.000.000 ini dikarenakan adanya sub kegiatan baru sehingga menyesuaian target yang semula 12 dokumen kini menjadi 16 Dokumen.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel, pada kegiatan ini telah terjadi penambahan pagu anggaran yang semula Rp11,208,348,906 pada menjadi Rp11,919,065,226 ini dikarenakan adanya sub kegiatan baru sehingga menyesuaian target yang semula 71 dokumen kini menjadi 72 Dokumen.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, pada kegiatan ini mengalami pengurangan pagu anggaran yang semula Rp100,000,000 kini menjadi Rp80,000,000 ini dikarenakan adanya efisiensi belanja pada kegiatan tersebut.
d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pada kegiatan ini telah terjadi penambahan pagu anggaran yang semula Rp850,000,000 pada menjadi Rp2,600,000,000 ini dikarenakan peningkatan kebutuhan atas barang milik daerah guna menunjang urusan pemerintah sehingga terjadi penyesuaian target yang semula 10 unit kini menjadi 14 Unit.

Adapun detail uraian diatas dapat dilihat dalam tabel Tabel T-C.33 sebagai berikut :

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025

dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahaal Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
219.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	72	26,088,291,625	APBD		72	23,477,575,305
219.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	118	1,000,000,000	APBD		12	800,000,000
219.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	9	450,000,000	APBD		9	400,000,000
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong Seberang	1	50,000,000	APBD			
219.01.2.01.0008	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong Seberang	1	50,000,000	APBD			
219.01.2.01.0009	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	1	250,000,000	APBD			

219.01.2.01.0010	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	1	50,000,000	APBD			
219.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	3	150,000,000	APBD		3	400,000,000
219.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Tenggarong Seberang	71	11,919,065,226	APBD		71	11,208,348,906
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong Seberang	1104	11,519,065,226	APBD		1104	10,813,348,906
2.19.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tenggarong Seberang	1	25,000,000	APBD		1	45,000,000
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tenggarong Seberang	42	350,000,000	APBD		42	350,000,000
219.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong Seberang	1	25,000,000	APBD			
219.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	17	80,000,000	APBD		16	100,000,000
219.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong Seberang	1	50,000,000	APBD			
219.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong Seberang	16	30,000,000	APBD		16	100,000,000
219.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Tenggarong Seberang	2	20,000,000	APBD		2	50,000,000
219.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Tenggarong Seberang	1	10,000,000	APBD			

219.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tenggarong Seberang	1	10,000,000	APBD		2	50,000,000
219.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Tenggarong Seberang	7	275,000,000	APBD		7	275,000,000
219.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tenggarong Seberang	1	25,000,000	APBD		1	25,000,000
219.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tenggarong Seberang	4	50,000,000	APBD		4	50,000,000
219.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tenggarong Seberang	40	100,000,000	APBD		40	100,000,000
219.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Tenggarong Seberang	40	100,000,000	APBD		40	100,000,000
219.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	8	1,095,000,000	APBD		8	1,095,000,000
219.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tenggarong Seberang	4	70,000,000	APBD		4	70,000,000
219.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tenggarong Seberang	34	120,000,000	APBD		34	120,000,000
219.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tenggarong Seberang	20	45,000,000	APBD		20	45,000,000
219.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tenggarong Seberang	1500	100,000,000	APBD		1500	100,000,000
219.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tenggarong Seberang	30	45,000,000	APBD		30	45,000,000
219.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tenggarong Seberang	3	70,000,000	APBD		3	70,000,000
219.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Tenggarong Seberang	3	100,000,000	APBD		3	100,000,000

219.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	300	400,000,000	APBD		300	400,000,000
219.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong Seberang	450	45,000,000	APBD		450	45,000,000
219.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong Seberang	2	100,000,000	APBD		2	100,000,000
219.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Tenggarong Seberang	14	2,600,000,000	APBD		10	850,000,000
219.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tenggarong Seberang	6	2,200,000,000	APBD		2	450,000,000
219.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tenggarong Seberang	7	200,000,000	APBD		7	200,000,000
219.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Tenggarong Seberang	1	200,000,000	APBD		1	200,000,000
219.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Tenggarong & Tenggarong Seberang	12	5,518,189,164	APBD		12	5,518,189,164
219.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tenggarong & Tenggarong Seberang	12	4,000,000,000	APBD		12	4,000,000,000
219.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tenggarong & Tenggarong Seberang	12	1,518,189,164	APBD		12	1,518,189,164
219.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tenggarong & Tenggarong Seberang	3.08	3,581,037,235	APBD		3.08	3,581,037,235

219.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tenggarong Seberang	30	300,000,000	APBD		30	300,000,000
219.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tenggarong Seberang	20	60,000,000	APBD		20	60,000,000
219.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Tenggarong & Tenggarong Seberang	2	3,021,037,235	APBD		2	3,021,037,235
219.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tenggarong & Tenggarong Seberang	1	200,000,000	APBD		1	200,000,000
219.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan Kepemudaan	Kutai Kartanegara	74.39	7,725,000,000	APBD		74.39	4,350,000,000
219.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Kepemudaan	Kutai Kartanegara	100	7,725,000,000	APBD		100	3,500,000,000
2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	5	2,400,000,000	APBD		500	1,450,000,000
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Kutai Kartanegara	275	1,275,000,000	APBD		80	1,000,000,000

2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	Kutai Kartanegara	20	650,000,000	APBD		20	150,000,000
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kutai Kartanegara	20	1,000,000,000	APBD		20	200,000,000
2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Kutai Kartanegara	370	700,000,000	APBD		100	200,000,000
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Kutai Kartanegara	60	700,000,000	APBD		30	200,000,000
2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Kutai Kartanegara	150	1,000,000,000	APBD		4	300,000,000
219.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Kutai Kartanegara	48.78	0	APBD		48.78	850,000,000
219.02.2.02.03	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Kutai Kartanegara	0	0	APBD		1	500,000,000
219.02.2.02.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	0	-	APBD		40	350,000,000
219.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Berolahraga	Kutai Kartanegara	34.20	19,700,000,000	APBD		29.58	11,500,000,000

219.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi	Kutai Kartanegara	21.05	2,150,000,000	APBD		21.05	1,400,000,000
219.03.2.01.05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Kutai Kartanegara	7	2,000,000,000	APBD		7	1,250,000,000
219.03.2.01.06	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kutai Kartanegara	40	150,000,000	APBD		40	150,000,000
219.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Kejuaraan olahraga	Kutai Kartanegara	100.00	3,750,000,000	APBD		100.00	600,000,000
219.03.2.02.04	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	4	1,650,000,000	APBD		1	200,000,000
219.03.2.02.05	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	1	200,000,000	APBD		1	200,000,000
219.03.2.02.06	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	1	1,900,000,000	APBD		1	200,000,000
219.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Atlet Lokal Yang Dibina	Kutai Kartanegara	46.45	5,450,000,000	APBD		23.33	3,750,000,000
219.03.2.03.06	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Kutai Kartanegara	100	350,000,000	APBD		100	350,000,000

219.03.2.03.07	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Kutai Kartanegara	20	100,000,000	APBD		20	100,000,000
219.03.2.03.09	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Kutai Kartanegara	52	4,300,000,000	APBD		52	3,000,000,000
219.03.2.03.10	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Kutai Kartanegara	40	600,000,000	APBD		40	200,000,000
219.03.2.03.11	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	1	100,000,000	APBD		1	100,000,000
219.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan Organisasi Keolahragaan	Kutai Kartanegara	3.51	1,900,000,000	APBD		3.51	1,750,000,000
219.03.2.04.05	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	Kutai Kartanegara	1	400,000,000	APBD		5	750,000,000
219.03.2.04.06	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	1	1,500,000,000	APBD		1	1,000,000,000
219.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase masyarakat yang berolahraga	Kutai Kartanegara	0.0082	6,450,000,000	APBD		0.0082	4,000,000,000
219.03.2.05.06	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kutai Kartanegara	3	300,000,000	APBD		3	200,000,000
219.03.2.05.07	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kutai Kartanegara	10	3,250,000,000	APBD		6	2,500,000,000
219.03.2.05.08	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Kutai Kartanegara	10	500,000,000	APBD		80	100,000,000

219.03.2.05.09	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kutai Kartanegara	5	400,000,000	APBD		5	200,000,000
219.03.2.05.10	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kutai Kartanegara	7	2,000,000,000	APBD		4	1,000,000,000
219.04	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan pembinaan kepramukaan	Kutai Kartanegara	100	2,450,000,000	APBD		100	2,450,000,000
219.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	Kutai Kartanegara	11.86	2,450,000,000	APBD		11.86	2,450,000,000
219.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kutai Kartanegara	1	150,000,000	APBD		1	150,000,000
219.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Kutai Kartanegara	1	150,000,000	APBD		1	150,000,000
219.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Kutai Kartanegara	60	200,000,000	APBD		60	200,000,000
219.04.2.01.04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	Kutai Kartanegara	2	150,000,000	APBD		2	150,000,000
219.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kutai Kartanegara	5	750,000,000	APBD		5	750,000,000
219.04.2.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kutai Kartanegara	3	150,000,000	APBD		3	150,000,000
219.04.2.01.07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	Kutai Kartanegara	2	150,000,000	APBD		2	150,000,000

219.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Kutai Kartanegara	5	750,000,000	APBD		5	750,000,000
					55,963,291,625				41,777,575,305

BAB V
PENUTUP

A. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Tahun berjalan Renja Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, merupakan perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1) Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2) Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

C. Rencana tindak lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, selanjutnya Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

r.RENJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan daerah, maka perlu dilaksanakan pembangunan di sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan berbagai macam kegiatan guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga dapat didayagunakan secara optimal, efisien dan efektif sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

a. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing,
b. Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru;
c. Meningkatnya hubungan Industrial yang harmonis dan Dinamis
d. Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru guna memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi dan sebagai mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

Sebagai dokumen rencana tahunan organisasi perangkat daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendorong penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

a. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan dokumen yang secara subtansial penerjemahan dari visi, misi dan program organisasi perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

b. Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dengan Perencanaan Program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
c. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ini merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kerja tahunan sebagai wujud dari kinerja OPD pada tahun 2025 yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis Rencana Kerja 2025 dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah no. 86 tahun 2017 tentang tata cara rencana pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Tata cara evaluasi peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja daerah, yang antara lain :

a. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berjalan;
b. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
c. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan Indikator Kinerja Hasil (outcome) indikator Kinerja Keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Berbagai upaya yang telah dan sedang dikembangkan untuk makin memperkuat peranan program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran pemerintah dan sumber daya lainnya yang semakin terbatas. Dengan dilatar belakangi keterbatasan sumber daya yang tersedia serta peluang dan tantangan yang harus dihadapi (Renja OPD) tahun 2025.

I.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai dasar hukum antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

19. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi,Serta Tata Kerja Pangkat Daerah Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 58);
20. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program OPD yang telah mengakomodir usulan hasil musrenbang dari tiap kecamatan Kab. Kutai Kartanegara sebagai suatu dokumen perencanaan. Rencana Kerja (RENJA) akan digunakan bagi seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Transmigrasi dan

Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembagunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Tujuan dari penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan standart ukuran capaian keberhasilan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sekaligus indikator capaian yang harus dipenuhi dan telah ditetapkan dalam Renstra PD dan RPJMD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pada tahun 2025.

I.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 disusun menurut Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat antara lain : Telaah terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja dan kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun depan (n).

BAB V PENUTUP

Bab Penutup menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2023 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2024. Pada tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja melaksanakan 7 (Tujuh) program dan 45 (Empat Puluh Lima) Sub Kegiatan sebagaimaana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) sejumlah Rp 41.558.444.573 (empat puluh satu milyar lima ratus lima puluh depan juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah). dalam pelaksanaan program tersebut dapat diselesaikan hampir seluruhnya dengan optimal. Secara detail pelaksanaan untuk program Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sehingga terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran. Program ini terdiri 8 (delapan) kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu oleh Sub Bagian Program Keuangan, Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan serta Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Alokasi anggaran sebesar Rp13.335.175.775 ,- dengan realisasi sebesar Rp12.107.677.687,- atau sebesar 90,8 % dan sisa anggaran sebesar Rp1.311.606.863,-.

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini merupakan salah satu penunjang program Dedikasi Bupati Kutai Kartanegara Kukar Siap Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 program penunjang ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta serta kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil ketiganya diampu oleh Bidang Pembinaan Pemberdayaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Pagu dari program ini adalah Rp 12.833.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp12.014.647.880,- 93,6%. Adapun rincian sub kegiatan yang termasuk program ini adalah sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerjaberdasarkan Klaster Kompetensi dengan pagu anggaran sebesar Rp 11.982.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp 11.530.278.980,- atau 96,2% Target 535 Orang, dengan capaian 535 Orang atau 100%
b. Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja dengan pagu anggaran sebesar Rp50.000.000,- dengan realisasi Rp. 0,- hal ini sebabkan karena banyaknya LPK yang tutup akibat covid dan isi DPA tidak dapat mengakomodir non PNS (salah dalam penyusunan alokasi).
c. Sub Kegiatan pengadaan sarana pelatihan kerja kabupaten/kota dengan pagu anggaran sebesar Rp 701.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp424.241.500,- atau 60,5%
d. Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan anggaran Rp50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp29.211.200,- atau 58,4 %

e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil dengan pagu anggaran sebesar Rp 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp30.916.200,- atau 61,8%.

3. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja ini bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan setengah penganggur melalui perluasan kesempatan kerja diberbagai bidang usaha baik diperkotaan maupun dipedesaan, dengan sasaran memperluas kesempatan kerja dalam berbagai bidang usaha dalam menciptakan tenaga kerja mandiri serta tersedianya sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja daerah, yang di ampu oleh Bidang Pembinaan Pemberdayaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu, Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja serta 4 (empat) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp6.429.999.798,- Realisasi Rp5.955.689.920,-,- atau 92,6 % . Adapun rincian sub kegiatan yang termasuk program ini adalah sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja dengan anggaran sebesar Rp50.000.0000,- realisasi Rp34.155.000,- atau 68,3%.
b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan dengan anggaran sebesar Rp75.000.000,- realisasi Rp53.893.320,- atau 71,8%
c. Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dengan anggaran sebesar Rp5.964.999.798,- realisasi Rp 5.561.083.900,- atau 93,2%
d. Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja dengan pagu anggaran Rp340.000.000,- realisasi Rp306.557.700,- atau 90,1 %

4. Program Hubungan Industrial

Program Hubungan Industrial merupakan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dimana program ini diampu oleh Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat-syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pagu program ini adalah Rp.7.834.869.000,- dengan serapan sebesar 99,1%. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan

yaitu Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untukPerusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu:

a. Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan dengan anggaran sebesar Rp215.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp196.920.631,- atau 91,5%
b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan dengan pagu anggaran sebesar Rp 179.340.000,- dengan realisasi sebesar Rp152.040.000,- atau 84,7%
c. Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp44.584.300,- atau 89,1%
d. Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp42.580.000,- atau 85,1%.
e. Sub Kegaiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp47.450.400,- atau 94,9%
f. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp47.516.000,- atau 95%
g. Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja dengan pagu anggaran sebesar Rp7.240.529.000,- dengan realisasi sebesar Rp7.231.594.000,- atau 99,8%, sub Kegiatan ini

merupakan salah salah program Bupati untuk membantu Masyarakat miskin dalam pembayayaran premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada Masyarakat bukan penerima upah yantersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Target Belanja Distransnaker Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1 T-C.29

Rekapitulasi Evalusi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara

OPD : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja PD tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	73,00	Persen	79,29	71,30	81,80	115	71,50	233	3,19
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah									
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen	5	5	5	100	3	13	87

2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Dokumen	3	3	3	100	3	9	60
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah									
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83	Orang/ Bulan	14	14	14	100	73	101	122
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	1	4	4	100	1	6	120
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset daerah yang di pelihara									
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Laporan	1	1	1	100	1	3	60

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja PD tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Sipil Negara									
6	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi	1	Dokumen	0	1	1	100	1	2	200
7	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	15	Dokumen	3	3	3	100	1	7	47
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10	Orang	5	5	3	60	5	13	130

9	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	73	Orang	55	73	0	0	83	138	189
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	35	Orang	8	35	18	51	40	66	189
11	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	146	Paket	0	146	146	100	0	146	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum									
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	Paket	2	1	1	100	1	4	80
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	Paket	3	5	5	100	1	9	300
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5	Paket	0	3	3	100	1	4	80

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja PD tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu Serta Rapat/Jumlah peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor	5	Paket	1	1	1	100	1	3	60
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	20	Paket	8	3	3	100	4	15	75
17	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	10	Paket	0	4	2	50	2	4	40
18	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	Laporan	12	12	12	100	1	25	
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	87	Laporan	24	87	87	100	57	168	193

		dalam dan luar daerah									
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit BMD yang diadakan									
20	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	110	Unit	0	102	100	98	3	103	94
21	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	Unit	1	1	1	100	0	2	29
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pengadaan sapras pendukung gedung dan bangunan	199	Unit	199	1	1	100	0	200	101
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan									
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan	12	12	12	100	12	36	300

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja PD tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
24	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Laporan	12	12	12	100	12	36	300
25	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlegkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	Laporan	12	12	12	100	12	36	300
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	12	12	12	100	12	36	300
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Aset yang di pelihara									

	Pemerintah Daerah										
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	24	Unit R2/R4	21	24	18	75	24	63	263
28	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tidak Berwujud	1	Paket	0	0	0	0	1	1	100
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6	Unit	1	1	1	100	1	3	50
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	22,43	Persen	15,38	18,59	22,90	123	20,50	59	262
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan									
30	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Berbasis Masyarakat	2082	Orang	348	535	535	100	507	1.390	67
31	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi	50	LPTKS	4	20	6	30	0	10	20

	Penyediaan										

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja PD tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas									
32	Pengadaan sarana pelatihan kerja kabupaten/kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	70	Unit	0	65	65	100	0	65	93
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Tersedia									
33	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan kerja swasta yang dibina	15	Lembaga	11	15	15	100	15	41	273
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Produktif									

34	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Terlaksananya konsultasi produktivitas terhadap perusahaan kecil	25	UMKM	25	25	25	100	25	75	300
III	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	TERSEDIANYA DATA RENCANA TENAGA KERJA DAERAH	100	Persen	100	100	100	100	100	300	3
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah data rencana tenaga kerja daerah									
35	Penyusunan sumber daya pelayanan antar kerja	Jumlsh perusahaan yang menyusun RTK mikro kabupaten/kota	15	Perusahaan	15	15	15	100	15	45	300
IV	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN	10,37	Persen	8,02	8,39	13,75	164	10,37	32	3,10
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Antar Kerja									
36	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Tersedianya sumber daya pelayanan	35	Orang	13	0	0	0	30	43	123
37	Pelayanan antar Kerja	Jumlah data lowongan dan penempatan tenaga kerja	25	Kecamatan	18	0	0	0	25	43	172

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja PD tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
38	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Fasilitasi Kesempatan Kerja	775	Orang	378	579	579	100	705	1.662	214
39	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	75	Orang	0	50	50	100	0	50	67
40	Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaam	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	75	Orang	0	10	10	100	0	10	13
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Layanan Antar Kerja									
41	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	5	Event	2	2	2	100	60	64	1.280

		melalui job fair/bursa kerja									
V	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE KASUSU PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG TERFASILITASI	100	Persen	100	100	100	100	100	300	300
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan Perjanjian Kerja yang dicatatkan Serta Perjanjian Kerja Bersama yang di Daftarkan									
42	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	20	Perusahaan	20	20	20	100	10	50	250
43	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama	20	Perusahaan	0	0	0	0	10	10	50
44	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB,	6	Laporan	2	2	2	100	2	6	100

	Hubungan Industrial dan	Struktur Skala Upah, dan									

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja PD tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan									
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Perusahaan yang Melaksanakan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan									
45	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1	Jumlah perselisihan yang dicegah	50	Perkara	15	15	15	100	15	45	90

	(satu) Daerah Kabupaten/Kota										
46	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	405	Perkara	125	100	100	100	80	305	75
47	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	6	Asosiasi	24	6	6	100	6	36	600
48	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	5	Lembaga	1	1	1	100	1	3	60
49	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	35.440	Orang	35.000	35.440	35.440	100	48.729	119.169	336

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja PD tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
VI	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	JUMLAH RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN DESA/KIMTRANS	4	Dokumen	2	2	1	50	2	5	125
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Rencana pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans									
50	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	5	Kawasan	1	1	1	100	1	3	60
51	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	5	Dokumen	1	1	1	100	1	3	60

VII	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	JUMLAH KAWASAN DESA/KIMTRANS YANG DIKEMBANGKAN	3	Kawasan	2	2	2	100	1	5	167
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Desa/Kimtrans yang di Kembangkan									
52	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	50	Kepala Keluarga	21	30	30	100	40	91	182
53	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	15	Satuan Permukima n	1	1	1	100	15	17	113

Tabel 1.1

Anggaran dan Realisasi Tahun 2023

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	PERSENTASE (%)
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH			13.335.175.775,00	12.107.677.687,00	90,80
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah			250.000.000,00	196.610.312,00	78,64
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	150.000.000,00	117.372.360,00	78,25
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	100.000.000,00	79.237.952,00	79,24
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah			8.630.565.320,00	7.970.992.075,00	92,36
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.022	Orang/Bulan	8.480.565.320,00	7.832.121.675,00	92,35
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Dokumen	150.000.000,00	138.870.400,00	92,58
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset daerah yang di pelihara			82.200.000,00	69.390.000,00	84,42
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	82.200.000,00	69.390.000,00	84,42

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Sipil Negara			767.800.000,00	600.423.493,00	78,20
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	146	Paket	267.710.000,00	253.080.000,00	94,54

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	PERSENTASE (%)
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	Dokumen	100.000.000,00	68.375.595,00	68,38
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Orang	105.000.000,00	58.151.696,00	55,38
9	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	73	Orang	50.000.000,00	44.000.982,00	88,00
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35	Orang	245.090.000,00	176.815.220,00	72,14
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum			754.700.000,00	660.780.152,00	87,56
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	29.700.000,00	28.680.000,00	96,57
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	125.000.000,00	120.754.100,00	96,60
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3	Paket	50.000.000,00	42.352.300,00	84,70
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	50.000.000,00	20.107.900,00	40,22
15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	50.000.000,00	43.467.100,00	86,93

16	Penyediaan Bahan/Materai	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	4	Paket	25.000.000,00	12.232.500,00	48,93
17	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	25.000.000,00	23.968.700,00	95,87
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	87	Laporan	400.000.000,00	369.217.552,00	92,30

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	PERSENTASE (%)
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit BMD yang diadakan			1.247.359.000,00	1.238.380.000,00	99,28
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	102	Unit	1.247.359.000,00	1.238.380.000,00	99,28
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			1.126.509.524,00	983.442.521,00	87,30
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	4.000.000,00	3.992.000,00	99,80
21	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	270.000.000,00	196.876.204,00	72,92
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlegkapan Kantor	umlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	69.867.000,00	59.400.000,00	85,02
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	782.642.524,00	723.174.317,00	92,40
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset yang di pelihara			476.041.931,00	387.659.134,00	81,43
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	Unit	276.041.931,00	190.484.134,00	69,01

25	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	200.000.000,00	197.175.000,00	98,59
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI			12.833.400.000,00	12.014.647.880,00	93,62
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan			12.733.400.000,00	11.954.520.480,00	93,88

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	PERSENTASE (%)
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	535	Orang	12.733.400.000,00	11.954.520.480,00	93,88
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			50.000.000,00	29.211.200,00	58,42
27	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15	Lembaga	50.000.000,00	29.211.200,00	58,42
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas			50.000.000,00	30.916.200,00	61,83
28	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	25	Perusahaan	50.000.000,00	30.916.200,00	61,83
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	CAKUPAN LAYANAN DATA INFORMASI TENAGA KERJA di WILAYAH KECAMATAN			300.000.000,00	238.849.320,00	79,62
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Data Rencana Tenaga Kerja Daerah			300.000.000,00	238.849.320,00	79,62
29	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro kabupaten/kota	15	Perusahaan	300.000.000,00	238.849.320,00	79,62
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN			6.429.999.798,00	5.955.689.920,00	92,62
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Antar Kerja			6.089.999.798,00	5.649.132.220,00	92,76

30	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50	Orang	50.000.000,00	34.155.000,00	68,31
31	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	10	Orang	75.000.000,00	53.893.320,00	71,86
32	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	579	Orang	5.964.999.798,00	5.561.083.900,00	93,23

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	PERSENTASE (%)
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Layanan Antar Kerja			340.000.000,00	306.557.700,00	90,16
33	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	140	Orang	340.000.000,00	306.557.700,00	90,16
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE KASUSU PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG TERFASILITASI			7.834.869.000,00	7.762.685.331,00	99,08
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan Perjanjian Kerja yang dicatatkan Serta Perjanjian Kerja Bersama yang di Daftarkan			394.340.000,00	348.960.631,00	88,49
34	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	20	Perusahaan	215.000.000,00	196.920.631,00	91,59
35	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2	Laporan	179.340.000,00	152.040.000,00	84,78

	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Perusahaan yang Melaksanakan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan			7.440.529.000,00	7.413.724.700,00	99,64
36	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	15	Perkara	50.000.000,00	44.584.300,00	89,17

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	REALISASI	PERSENTASE (%)
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					
		Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kabupaten/Kota						
37	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	100	Perkara	50.000.000,00	42.580.000,00	85,16
38	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	6	Asosiasi	50.000.000,00	47.450.400,00	94,90
39	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	Lembaga	50.000.000,00	47.516.000,00	95,03
40	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	35.440	Orang/Bulan	7.240.529.000,00	7.231.594.000,00	99,88
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans			525.000.000,00	398.958.940,00	75,99
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Rencana pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans			525.000.000,00	398.958.940,00	75,99
41	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung	1	Kawasan	150.000.000,00	120.009.340,00	80,01

		Penetapan Kawasan Transmigras					
42	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1	Dokumen	375.000.000,00	278.949.600,00	74,39
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan Desa/Kimtrans yang di Kembangkan			300.000.000,00	262.669.102,00	87,56
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Desa/Kimtrans yang di Kembangkan			300.000.000,00	262.669.102,00	87,56

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)			PAGU INDIKATIF	REALISASI	PERSENTASE (%)
		Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	30	Kepala Keluarga (KK)	100.000.000,00	82.258.352,00	82,26
44	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1	Kawasan	200.000.000,00	180.410.750,00	90,21
JUMLAH					41.558.444.573,00	38.741.178.180,00	93,22

Berdasarkan tabel diatas Penyerapan Anggaran Belanja pada tahun 2023 sebesar 93,22% dari total Anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari Realisasi Anggaran dan Sasaran. Penyerapan Anggaran terbesar pada Program Hubungan Industrial sebesar 99,08%, Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi 75,99% Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sebesar 93,62%, Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebesar 87,56% Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 90,80%, Program Perencanaan Tenaga Kerja sebesar 79,62% dan Program Penempatan Tenaga Kerja sebesar 92,62%.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan di ikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi. Anggaran dan Realisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tahun 2023 terdapat penyerapan anggaran sebesar Rp38.741.178.180,- (93,22%) dari total pagu sebesar Rp41.558.444.573,-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara adalah melaksanakan fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Distransnaker, maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai

tugas pokok :

"Membantu Bupati, melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja."

Dalam melaksanakan tugas pokok diatas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi :

a. Merumuskan kebijakan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;;
d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;dan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Indikator Kinerja Utama (IKK) urusan wajib ketenagakerjaan dan urusan pilihan ketransmigrasian .

Permendagri Nomor 73 tahun 2010 tentang indikator kinerja kunci (IKK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ditetapkan 3 indikator kunci, yaitu:

Urusan Ketenagakerjaan

Tenaga Kerja yang bersertifikat Kompetensi dengan rumusan pencari kerja yang dilatih dibagi dengan data awal renstra dikali 100.

1. Pencari kerja yang terdaftar ditempatkan dengan rumusan jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar dikali 100.

Urusan Ketransmigrasian

1. Perencanaan Penyediaan Pencadangan Lahan Rencana Kawasan Transmigrasi dengan target 3 rencana Kawasan pengembangan.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja seperti pada Tabel 2 T-C.30 berikut :

Tabel 2 T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Sumber : RENSTRA 2021 – 2026

No	Indikator Sasaran	SPM/ Standar Nasional	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (input) =(IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing		Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat Kompetensi	300 Orang (14,75)	300 Orang (18,59)	300 Orang (22,43)	300 Orang (26,27)	348 Orang (15,38)	554 Orang (22,9)	300 Orang (22,43)	300 Orang (26,27)	
2	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru		Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	6,41%	8,39%	10,37%	12,35 %	9,20%	13,75 %	37,60 %	12,35 %	
3	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis		Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100,00 %	100%	100%	
4	Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru		Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di rencanakan	2	0	1	1	2	1	1	1	
			Jumlah Kawasan Transmigras	1	1	1	1	0	1	1	1	

			i yang di tetapkan									
			Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di Bangun	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di Kembangkan	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.		Predikat akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.	71,30	71,50	73	75,30	79,29	81,80	73	75,30	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.

Berbagai isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dab fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
3. Percepatan Transformasi ekonomi dan Pertumbuhan ekonomi yang eksklusif;
4. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
6. Peningkatan Eksebilitas dan Konektivitas Infrastruktur;

Isu tersebut yang perlu mendapatkan perhatian pelaksanaan tugas fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja bila tidak ditangani dengan tepat dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara, dan terhadap capaian program nasional di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini terkait dengan capaian indicator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD yang pelaksanaanya adalah oleh Perangkat Daerah sesuai pelimpahan kewenagan yang diberikan

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi OPD:

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara pada dasarnya sudah bersinergi dengan Program/Kegiatan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI juga dengan Program/Kegiatan Provinsi.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini adalah masih kurangnya sumber daya aparatur utamanya makin berkurang tenaga fungsional seperti

pengantar kerja dan mediator serta masih belum adanya tenaga fungsional instruktur pelatihan. Disisi lain kebutuhan akan tenaga fungsional ini sangat mendesak untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang ada karena fungsi pegawai teknis ini tidak dapat tergantikan oleh PNS/ASN biasa. Selain hal tersebut diatas ada juga

Permasalahan yang dihadapi sebagai berikut ;

1. Belum Optimalnya koordinasi antara Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia Perencanaan dan Pengelola Data .
3. Belum tersedianya data-data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan
5. Penduduk usia kerja atau angkatan kerja Meningkat tidak diimbangi dengan peluang kerja;
6. Tingkat Pengangguran dan kemiskinan yang masih relatif tinggi sebagai dampak perubahan ekonomi dan kondisi lingkungan serta kesehatan masyarakat;
7. Rendahnya keterampilan/vokasi masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif
8. Masih rendahnya partisipasi Perusahaan dalam menyampaikan atau melaporkan penerimaan tenaga kerja dan lowongan kerja yang tersedia
9. Kurang keterkaitan antara kawasan pedesaan sebagai hinterland dengan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi;
10. Pembangunan dipedesaan relatif kurang berkembang yang diakibatkan masih minimnya insfrastruktur (jalan, jembatan sarana dan prasarana)

Hambatan :

1. Lokasi yang tersebar di kab. Kutai Kartanegara.

2. Masih rendahnya partisipasi Perusahaan dalam menyampaikan atau melaporkan penerimaan tenga kerja dan lowongan kerja yang tersedia
3. Kurangnya tenaga kerja fungsional instruktur.
4. Perubahan regulasi tentang tata cara perencanaan Kawasan transmigrasi (Permendes No.05 Tahun 2021)

2.3.2 Dampak Terhadap Pencapaian Visi, Misi kepala Daerah

Belum Optimalnya koordinasi dan pencapaian target program Bupati Kutai Kartanegara antara Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah mengakibatkan tidak tercapainya target yang sudah ditentukan yaitu jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi dan jumalah tenaga kerja ditempatkan. Kekurangan SDM tenaga kerja fungsional instruktur ini bisa berdampak pada tidak tercapainya kinerja OPD seperti yang telah ditargetkan, sehingga pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, khususnya Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan kerja menjadi tidak optimal. Disamping hal tersebut permasalahan dan hambatan yang dihadapi adalah belum sinerginya perencanaan dan pelaksanaan program-program sektoral untuk dapat fokus pada pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja, antara lain perluasan kesempatan kerja sektoral belum didukung tingkat kompetensi tenaga kerja yang tersedia mengingat kompetensi tenaga kerja yang tersedia belum sesuai kebutuhan di pasar kerja, serta tidak tercapainya target capaian program kukar siap kerja.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan pelayanan OPD

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan OPD yaitu fakta bahwa mayoritas angkatan kerja di kabupaten Kutai kartanegara memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah atau belum memiliki keahlian untuk memasuki pasar kerja, angkatan kerja di kabupaten Kutai kartanegara saai ini didominasi oleh pekerja yang kurang terampil atau low skill sehingga kurang dapat bersaing dengan pekerja diluar wilayah Kutai Kartanegara. Data Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kukar menunjukkan dari 371.349 orang angkatan kerja saat ini terdapat 356.298 orang yang

bekerja, dari angkatan kerja tersebut sebanyak 15.051 orang yang mencari pekerjaan/pengangguran. Dari data tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus di selesaikan oleh OPD untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia demi pembangunan ketenagakerjaan yang baik. Tantangan lain dalam meningkatkan pelayanan OPD adalah masuknya Investasi di berbagai bidang di Ibu Kota Negara mengakibatkan banyak pekerjaan baru muncul, dibarengi dengan persaingan berbagai pekerjaan yang akan mengubah kondisi sektor ketenagakerjaan secara signifikan.

Peluang-Peluang (opportunities) dalam pengembangan dan meningkatkan pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain sebagai berikut:

a. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. Terbukanya kasempatan bagi tenaga kerja yang ada di Kutai Kartanegara untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang akan menambah keterampilan dan skill tenaga kerja sasuai dengan pasar kerja dan melakukan pelatihan bersertifikasi guna memberikan kesempatan bagi pencari kerja dalam bersaing mendapatkan pekerjaan
c. Akses informasi yang semakin cepat, tepat dan mudah

2.3.4 Rekomendasi

Rekomendasi untuk peluang kesempatan kerja yaitu memperbanyak pelatihan- pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat yang dapat menyerap tenaga kerja dan menciptakan wirausahawan baru di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan produktivitas serta daya saing pencari kerja. Untuk kegiatan pelatihan berbasis masyarakat yang dilanjutkan dengan pelatihan kewirausahaan, sehingga dapat berwirausaha mandiri. untuk dapat berwirausaha mandiri maka diperlukan modal usaha, karena itu bantuan permodalan paska pelatihan sangatlah diperlukan dalam upaya membina wirausaha mandiri, sehingga pada akhirnya menyerap tenaga kerja non formal.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Untuk meningkatkan kualitas SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara perlu mereview terhadap rancangan akhir dan hasil analisis kebutuhan pada program dan kegiatan tahun 2025, adapun rincian sebagai berikut:

Tabel 3 T-C.31

Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,00	19.419.195.795	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,00	15.984.584.926	
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	510.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	1.000.000.000	
1	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	-	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
2	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorl Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	-	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorl Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	250.000.000	

3	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	1 Berita Acara	-	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	1 Berita Acara	50.000.000	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Perencanaan Perangkat Daerah			Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Perencanaan Perangkat Daerah			
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	210.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	450.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil	45 Dokumen	200.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil	45 Dokumen	-	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50.000.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	3 Laporan	100.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Distransnaker Kab.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	2 Laporan	150.000.000	

			Daerah				Kukar	Daerah			
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	10.639.876.880	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	9.524.673.039	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 orang/ bulan	10.489.876.880	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 orang/ bulan	9.324.673.039	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/ Semesteran SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Se mesteran SKPD	1 Laporan	150.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula na n/Semesteran SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Se mesteran SKPD	1 Laporan	150.000.000	
11	Penyusunan Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000	
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	1 Laporan	82.200.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	1 Laporan	105.000.000	
12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000	

						SKPD					
13	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	-	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000.000	
14	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	82.200.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000	
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Aparatur Sipil Negara	124 orang	787.790.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Aparatur Sipil Negara	124 orang	505.000.000	
15	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana	83 Orang	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Distransnaker Kab.	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana	83 Orang	100.000.000	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Disiplin Pegawai		Disiplin Pegawai			Disiplin Pegawai	Kukar	Disiplin Pegawai			
16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	140 Paket	237.790.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	140 Paket	-	
17	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	100.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000	
18	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	50.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	100.000.000	
19	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	150.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	150.000.000	
20	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	69 Orang	50.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	69 Orang	50.000.000	

21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	200.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	55.000.000	
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Layanan	904.700.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Layanan	529.700.000	
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.700.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.700.000	
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
26	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	50.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
27	Penyediaan Bahan/Material	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	150.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	25.000.000	
28	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.000.000	
29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000	

VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	2 Unit	3.505.810.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	1 Unit	2.749.250.000	
30	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Distransnaker Kab. Kukar	umlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	2.149.250.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Distransnaker Kab. Kukar	umlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	2.149.250.000	
31	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	355.560.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	-	
32	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	15 Unit	1.001.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	15 Unit	600.000.000	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Disediakan			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Disediakan			
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	2.322.776.984	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.044.919.956	
33	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000	
34	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000	
35	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	69.867.000	
36	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	1.868.776.984	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Distransnaker Kab.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	671.052.956	

			Umum Kantor yang Disediakan				Kukar	Umum Kantor yang Disediakan			
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang di pelihara	30 Unit	666.041.931	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang di pelihara	30 Unit	526.041.931	
37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	276.041.931	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	276.041.931	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	90.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	-	
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	
40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	26,27	10.952.340.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	26,27	7.153.540.000	

	TENAGA KERJA					TENAGA KERJA					
			Penyediaan Pusat Latihan Tenaga Kerja KUKAR IDAMAN	3 Unit				Penyediaan Pusat Latihan Tenaga Kerja KUKAR IDAMAN	3 Unit		
IX	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	300 orang	10.852.340.000	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	589 orang	7.053.540.000	
41	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	18 Kecamatan di Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	507 Orang	10.252.340.000	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	589 Orang	7.053.540.000	
42	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Kab. Kutai	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana	1 Unit	600.000.000	Pengadaan Sarana Pelatihan	Kec. Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana	1 Unit	-	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Kabupaten/Kota	Kartanegara	Pelatihan Kerja			Kerja Kabupaten/Kota	Bangun	Pelatihan Kerja			
X	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah lembaga pelatihan kerja yang tersedia	15 Lembaga	25.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah lembaga pelatihan kerja yang tersedia	15 Lembaga	25.000.000	
43	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kec. Muara Wis, Sebulu, Tenggarong, Tgr Seberang, Marang Kayu, Loa Kulu,	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lembaga	25.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lembaga	25.000.000	
XI	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan kecil yang produktif	25 Perusahaan	25.000.000	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan kecil yang produktif	25 Perusahaan	25.000.000	
44	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kec. Muara Wis, Teggarong, Tgr Seberang,	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	25 Perusahaan	25.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	25 Perusahaan	25.000.000	

		sebulu, Muara Kaman, loa Kulu									
XII	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	25 Persen	50.000.000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	25 Persen	50.000.000	
45	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen hasil pengukuran produktivitas da daya saing tenaga kerja di tingkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
III	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Cakupan Layanan Data Informasi Tenaga Kerja Di Wilayah Kecamatan	100%	450.000.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Cakupan Layanan Data Informasi Tenaga Kerja Di Wilayah Kecamatan	100%	450.000.000	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
XIII	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Data Rencana Tenaga Kerja Daerah	1 Dokumen	450.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Data Rencana Tenaga Kerja Daerah	1 Dokumen	450.000.000	
46	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	300.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	300.000.000	
47	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro.	20 Orang	150.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro kabupaten/kota.	20 Orang	150.000.000	
IV	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam/Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten	12,35%	7.100.000.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam/Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten	12,35%	5.300.000.000	
XIV	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan antar kerja	2 Layanan	6.750.000.000	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Antar Kerja	2 Layanan	4.950.000.000	

48	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lainlain untuk Peningkatan Kompetensi	60 Orang	300.000.000	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lainlain untuk Peningkatan Kompetensi	60 Orang	300.000.000	
49	Pelayanan Antar Kerja	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	50 Orang	100.000.000	Pelayanan Antar Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	50 Orang	100.000.000	
50	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	200.000.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	200.000.000	
51	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	30 Orang	150.000.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	30 Orang	150.000.000	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
52	Perluasan Kesempatan Kerja	Kec. Sebulu, Muara Muntai Muara Wis, Loa Janan, Kota Bangun, Kembang Janggut, Tabang, Samboja, Tenggarong	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	600 Orang	6.000.000.000	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	671 Orang	4.200.000.000	
XV	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen	Dokumen	50.000.000	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	
53	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	10 Lembaga	50.000.000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS	Kec. Tenggarong	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	10 Lembaga	50.000.000	

	secara Terintegrasi					secara Terintegrasi					
XVI	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah informasi pasar kerja	1 Event	300.000.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah informasi pasar kerja	2 Event	300.000.000	
54	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	100 Orang	300.000.000	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	100 Orang	300.000.000	
V	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitasi	100%	11.386.704.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitasi	100%	11.386.704.000	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
XVII	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja yang dicatatkan serta Perjanjian Kerja Bersama yang di daftarkan	28 Perusahaan	462.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja yang dicatatkan serta Perjanjian Kerja Bersama yang di daftarkan	28 Perusahaan	462.000.000	
55	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	25 Perusahaan	150.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	25 Perusahaan	150.000.000	
56	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	Kec. Loa Janan, Sanga-sanga, Tgr Seberang, Muara	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	25 Perusahaan	100.000.000	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	25 Perusahaan	100.000.000	

		Kaman, Anggana									
57	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kec. Tenggarong	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2 Laporan	212.000.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kec. Tenggarong	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2 Laporan	212.000.000	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
XVII	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitasi Perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan	65 Perusahaan	10.924.704.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitasi Perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan	65 Perusahaan	10.924.704.000	
58	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Muara Kaman, Muara Muntai, Kembang Janggut, Sebulu, Tgr Seberang, Muara Jawa, Samboja, LoaJanan, Sanga-	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	200.000.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdam pak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Muara Muntai, Loa Janan, Sebulu, Kembang Janggut, Muara Kaman, Samboja, Muara Jawa, Sanga Sanga, Tenggar	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	200.000.000	

		sanga,					ong Seberang				
59	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Distransnaker Kab. Kukar	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	100 Perkara	150.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdam pak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	100 Perkara	150.000.000	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
60	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Kec. Tenggarong	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	6 Asosiasi	150.000.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Kec. Tenggarong	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	6 Asosiasi	150.000.000	
61	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tenggarong	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	100.000.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tenggarong	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	100.000.000	
62	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	Distransnaker Kab. Kukar	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	48.729 Orang	10.324.704.000	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	Kab. Kutai Kartanegara	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	48.729 Orang	10.324.704.000	

VI	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang Direncanakan	1 Kawasan	650.000.000	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang Direncanakan	1 Kawasan	650.000.000	
XIX	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan	1 Dokumen	650.000.000	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan	1 Dokumen	650.000.000	
63	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	2 Dokumen	650.000.000	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Sumber Sari , Giri Agung , Mekar Jaya , Sidomukti , Manunggal Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	2 Dokumen	650.000.000	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
							, Bukit Pariaman , Buana Jaya , Mulawarman , Suka Maju				
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Jumlah Kawasan Desa/Kimtrans yang dikembangkan	1 Kawasan	750.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Jumlah Kawasan Desa/Kimtrans yang dikembangkan	1 Kawasan	750.000.000	
XX	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian		Jumlah Rencana pengembang an Kawasan Desa/Kimtrans	1 Kawasan	750.000.000	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian		Jumlah Rencana pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans	1 Dokumen	750.000.000	
64	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	70 KK	450.000.000	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jonggon Desa , Margahayu , Panca Jaya , Bunga Jadi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	70 KK	450.000.000	

65	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 Satuan Permukiman	300.000.000	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Sidomukti , Cipari Makmur	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 Satuan Permukiman	300.000.000	
	JUMLAH				50.708.239.795	JUMLAH				41.674.828.926	

Pada tabel 3 tersebut Rancangan Akhir Program dan Kegiatan terdapat 8 (delapan) Program, 20 (dua puluh) Kegiatan dan dan 65 (enam puluh lima) Sub Kegiatan dengan pagu anggran sebesar Rp50.708.239.795,- Setelah dilakukan Analisis Kebutuhan Menjadi 60 (enam puluh) Sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp41.674.828.926 yang meningkat dari pagu awal RKPD , uraian penambahan Pagu anggaran sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

   Pagu anggaran program penunjang urusan pemerintah daerah sesuai Rancangan RKPD adalah sebesar Rp19.419.195.795,- kemudian sesuai hasil analisis kebutuhan menjadi Rp15.984.584.926,-. Perubahan penambahan pagu sebagaimana dimaksud adalah disebabkan beberapa hal sebagai berikut;

   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang semula dengan pagu anggaran Rp510.000.00 setelah dilakukan analisis kebutuhan diperlukan penambahan 3 Sub Kegiatan yaitu, Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan, dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD maka dilakukan penambahan anggaran menjadi R1.000.000.000,-

   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang semula pagu anggaran Rp10.639.876.880,- setelah dilakukan analisis kebutuhan mengalami penurunan menjadi Rp9.524.673.039,-, akan tetapi adanya penambahan 2 Sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

   c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang semula dengan pagu anggaran Rp82.200.000,- setelah dilakukan analisis kebutuhan

memerlukan penambahan pagu anggaran menjadi Rp105.000.000,- Penambahan dimaksud untuk 2 Sub kegiatan baru yaitu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebelumnya memiliki pagu sebesar Rp787.790.000,- setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp505.000.000,- penurunan disebabkan sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya pengalokasian anggaran dipindah ke Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai, selain itu Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan mengalami pengurangan anggaran
e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang semula pagu anggaran Rp904.700.000,- setelah dilakukan analisis kebutuhan memerlukan penambahan anggaran menjadi Rp529.700.000,- Pengurangan tersebut berasal dari Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki pagu sebesar Rp3.505.810.000,- setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp2.749.250.000,- pengurangan pagu disebabkan dihapusnya alokasi anggaran pada Sub Kegiatan Pengadaan
g. Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp2.322.776.984,- setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp1.004.919.956,- pengurangan pagu pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mengalami penurunan pagu anggaran yang semula Rp666.041.931,- setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp526.041.931,-

2. Program Hubungan Industrial

Pagu Anggaran Program Hubungan Industrial sesuai Rancangan RKPD adalah sebesar Rp11.386.704.00,- kemudian sesuai hasil analisis kebutuhan menjadi, Rp11.386.704.000,-. Setelah dilakukan analisis kebutuhan Pagu Kegiatan tidak ada yang berkurang atau bertambah.

3. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Pagu anggaran Program Perencanaan Tenaga Kerja sesuai dengan Rancangan RKPD adalah sebesar Rp450.000.000,- setelah dilakukan analisis kebutuhan terjadi penambahan pagu anggaran sebesar Rp450.000.000,- Setelah dilakukan analisis kebutuhan Pagu Kegiatan tidak ada yang berkurang atau bertambah.

4. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pagu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sesuai Rancangan RKPD adalah sebesar Rp10.952.340.000,- setelah di analisis kebutuhan menjadi Rp7.153.540.000,- sesuai hasil analisis kebutuhan terdapat kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran pagu sebagaimana dimaksud adalah disebabkan bebrapa hal sebagai berikut;

- Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi dengan Sub kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi yang semula Rp10.852.340.000,- mengalami penurunan menjadi Rp7.053.540.000,- Penghapusan pagu anggaran terjadi pada sub kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota

5. Program Penempatan Tenaga Kerja

Pagu anggaran Program Penempatan Tenaga Kerja sesuai Rancangan RKPD adalah sebesar Rp7.100.000.000,- sesuai hasil analisis kebutuhan berkurang menjadi Rp5.300.000.000,- perubahan anggaran pagu sebagaimana dimaksud adalah

disebabkan bebrapa hal sebagai berikut;

- Pada Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota mengalami penurunan semula sebesar Rp6.750.000.000,- setelah dilaukan analisis kebutuhan menjadi Rp4.950.000.000,- Pengurangan anggaran pada sub kegiatan perluasan kesempatan kerja

6. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

   Pada Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi sesuai Rancangan RKPD sebesar Rp650.000.000,- setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp650.000.000,- Setelah dilakukan analisis kebutuhan Pagu Kegiatan tidak ada yang berkurang atau bertambah.

7. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

   Pada Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi sesuai Rancangan RKPD sebesar Rp750.000.000,- setelah dilakukan analisis kebutuhan menjadi Rp750.000.000,- Setelah dilakukan analisis kebutuhan Pagu Kegiatan tidak ada yang berkurang atau bertambah.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini berdasarkan usulan masyarakat melalui Musrenbang kabupaten/kota serta mengakomodir usulan dari Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Distransnaker telah diakomodir dalam program kegiatan dalam Renja Distransnaker Kab. Kukar tahun 2024. Berdasar hasil telaah diatas, penentuan isu strategis didasarkan pada hasil telaah permasalahan pada lingkup tugas dan pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, telaah Visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara, telaahan renstra kementerian/lembaga dan Provinsi serta telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, maka disusunlah program dan kegiatan yang berkaitan kegiatan masyarakat sesuai dengan kamus usulan yang sudah disampaikan kepada pihak kecamatan dan desa untuk mempermudah dalam pengusulan program kegiatan yang sesuai dengan program kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025 dan selanjutnya di usulkan dalam selanjutnya di entri dalam aplikasi SIPD RI. Proses selanjutnya di Verifikasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan

Daerah. Selanjutnya dari hasil verifikasi Bappeda dalam Aplikasi SIPD Tugas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja memverivikasi usulan masyarakat dalam SIPD sesuai dengan kamus usulan guna penentuan apakah usulan tersebut akan ditindak lanjuti atau di kembalikan kepada masyarakat.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung sesuai isu-isu strategis sesuai tugas dan funsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dan di Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja; serta Peningkatan Kompetensi tenaga Kerja maka disusunlah program dan kegiatan yang berkaitan kegiatan masyarakat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4 T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan

Tahun 2025 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	5	6	7	8
I	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	589 Orang	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		
1	Pelatihan Scafolding	Kabupaten Kutai Kartanegara		40 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
2	Pelatihan Rigger	Kabupaten Kutai Kartanegara		40 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
3	Pelatihan Foklift	Kabupaten Kutai Kartanegara		20 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
4	Pelatihan Dasar Mekanik Alat Berat	Kabupaten Kutai Kartanegara		60 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA

5	Pelatihan Operator Alat Berat	Kabupaten Kutai Kartanegara		80 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
6	Pelatihan Ahli K3 Umum	Kabupaten Kutai Kartanegara		40 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
7	Pelatihan Diksar Gada Pratama	Kabupaten Kutai Kartanegara		80 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
8	Pelatihan Welder 3G	Kabupaten Kutai Kartanegara		100 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
9	Pelatihan Servis Sepeda Motor	Kabupaten Kutai Kartanegara		30 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
10	Biaya Operasional (AP)	Kabupaten Kutai Kartanegara		9 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
11	Pelatihan Instrumen Level 1 (Pelatihan Digital Marketing " Dasar – dasar Teknik Digital Marketing dan Pengelolaan Sosial Media untuk menghadapi persaingan Dunia Kerja Tahap 1)	Kabupaten Kutai Kartanegara		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
12	Pelatihan Instrumen Level 1 (Pelatihan Digital Marketing " Dasar – dasar Teknik Digital Marketing dan Pengelolaan Sosial Media untuk menghadapi persaingan Dunia Kerja Tahap 2)	Kabupaten Kutai Kartanegara		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
13	Pelatihan Anggota Organisasi Kepemudaan dalam berwirausaha (Pelatihan security)	Kecamatan Muara Wis		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
14	Pelatihan Anggota Organisasi Kepemudaan dalam berwirausaha (Pelatihan security)	Kecamatan Kota Bangun Darat		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
15	Pelatihan Anggota Organisasi Kepemudaan dalam berwirausaha (Pelatihan security)	Kecamatan Kenohan		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA

16	Pelatihan Anggota Organisasi Kepemudaan dalam berwirausaha (Pelatihan security)	Kecamatan Kembang Janggut		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
17	Pelatihan Anggota Organisasi Kepemudaan dalam berwirausaha (Pelatihan security)	Kecamatan Tabang		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
II	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN (DALAM/LUAR NEGERI) MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA DALAM WILAYAH KABUPATEN	671 Orang	
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Antar Kerja		
1	Pembekalan Tata Boga	Kabupaten Kutai Kartanegara		150 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
2	Pembekalan Tata Rias	Kabupaten Kutai Kartanegara		80 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
3	Pembekalan Menjahit	Kabupaten Kutai Kartanegara		30 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
4	Pembekalan Pertukangan	Kabupaten Kutai Kartanegara		20 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
5	Pembekalan Barber Shop	Kabupaten Kutai Kartanegara		60 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
6	Pembekalan Barista	Kabupaten Kutai Kartanegara		30 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
7	Pembekalan Bengkel Motor	Kabupaten Kutai Kartanegara		30 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
8	Pembekalan Servis Mesin Ces	Kabupaten Kutai Kartanegara		20 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
9	Pembekalan Bengkel Las	Kabupaten Kutai Kartanegara		20 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA

10	Pembekalan Therapis	Kabupaten Kutai Kartanegara		20 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
11	Pembekalan Meubeul	Kabupaten Kutai Kartanegara		20 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
12	Pelatihan Pemuda untuk Berwirausaha (Wirausaha	Kecamatan Muara Muntai		10 Orang	Mendukung Prodek
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
	Perseorangan untuk Pemula) (Bantuan Mesin jahit) (kelompok Menjahit Barokah Bersama RT 009 Desa Muara Muntai Ulu)				KUKAR SIAP KERJA
13	Pembekalan Menjahit (Bantuan Mesin jahit dan pelatihan menjahit)	Kecamatan Kembang Janggut		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
14	Pelatihan Pemuda untuk Berwirausaha (Wirausaha Perseorangan untuk Pemula) (Pelatihan menjahit dan pengadaan mesin jahit) (semoga berkah)	Kecamatan Muara Muntai Ulu		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
15	Pelatihan Pemuda untuk Berwirausaha (Wirausaha Perseorangan untuk Pemula) (Bantuan alat jahit lengkap) (Mandiri R9)	Kecamatan Muara Muntai Ulu		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
16	Pelatihan Pemuda untuk Berwirausaha (Wirausaha Perseorangan untuk Pemula) (Bantuan mesin jahit lengkap) (Asmaul husna)	Kecamatan Muara Muntai Ulu		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
17	Pelatihan Pemuda untuk Berwirausaha (Wirausaha Perseorangan untuk Pemula) (Bantuan mesin jahit lengkap) (Dahlia)	Kecamatan Muara Muntai Ulu		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
18	Pelatihan Pemuda untuk Berwirausaha (Wirausaha Perseorangan untuk Pemula)(Bantuan Mesin jahit lengkap)(Anggrek bulan)	Kecamatan Muara Muntai Ulu		10 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA
19	Bantuan Peralatan Mesin Menjahit Kelompok Wanita desa kahala hilir	Kahala Ilir		1 Orang	Mendukung Prodek KUKAR SIAP KERJA

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 prioritas Nasional ke 4 (empat) Memperkuat Pembangunan Smber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olah Raga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas. Serta Prioritas 6 (Enam) Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Selaras dengan kebijakan Pembangunan Nasional, Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara memastikan bahwa tujuan dan sasaran dari Kebijakan Nasional di bidang ketenagakerjaan diperjelas dan dipahami dengan baik oleh semua pihak terkait dengan adanya evaluasi terhadap kesesuaian tujuan dan sasaran dengan kondisi aktual di lapangan serta potensi dampak yang dapat dicapai. Serta menelaah strategi yang telah dirumuskan dalam Kebijakan Nasional dan menyesuaikannya dengan sumber daya yang tersedia serta kebutuhan yang ada di tingkat regional atau lokal.

Kebijakan Kementerian Tenaga Kerja
1. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan peningkatan produktivitas.
2. Meningkatkan perluasan Kesempatan Kerja melalui kegiatan padat karya infrastruktur dan Penempatan tenaga kerja bersifat inklusif
3. Meningkatkan pelayanan public Ketenagakerjaan dengan melaksanakan evaluasi terhadap Rencana Tenaga Kerja Daerah.
4. Menciptakan iklim Hubungan Industrial yang kondusif melalui mediasi dan peningkatan jaminan sosial ketenagakerjaan.
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perekonomian melalui peningkatan pelaksanaan transmigrasi.

Secara eksplisit Kebijakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara tidak lepas dengan kewenangan yang ada yaitu pembenahan aspek Sumber Daya Manusia, berupa :

Urusan Ketenagakerjaan

a. Meningkatkan pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi, berbasis kewirausahaan dan berbasis masyarakat
b. Perluasan kesempatan kerja melalui padat karya
c. Meningkatkan informasi lowongan kerja
d. Optimalisasi kerjasama dengan perusahaan penerimaan tenaga kerja
e. Optimalisasi informasi lowongan kerja dan tidak lanjut dari program yang telah dijalankan
f. Meningkatkan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial
g. Meningkatkan pelayanan kepersertaan jamsostek
h. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, dengan indikator kinerja sasaran strategis jumlah tenaga kerja yang mendapat fasilitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja.
i. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim ketenagakerjaan, dengan indicator kinerja sasaran strategis
    1. Meningkatnya perusahaan yang membentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
    2. Menurunnya Perselisihan Hubungan Industrial (HI)
    3. Meningkatnya perusahaan yang telah menyusun struktur dan skala upah
    4. Meningkatnya Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang berfungsi

Urusan Ketransmigrasian

a. Telah dilaksanakanya penyempurnaan penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi di Kecamatan Kota Bangun, dan penyusunan rencana kawasan Kecamatan Tabang. Untuk RKT Kecamatan Kota Bangun menunggu hasil penilaian dari TIM Pusat untuk penetapan Rencana Kawasan Transmigrasi.
b. Setelah adanya penetapan RKT dari Pemerintah Pusat akan dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Satuan Kawasan Permukiman (RTSKP).

Program yang dilaksanakan untuk mendukung visi dan misi merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program yang telah ditetapkan Distransnaker Kab. Kukar adalah sebagai berikut :

No	Nama Program	Sumber Dana	Penanggung Jawab
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	APBD	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	APBD	Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	APBD	
4.	Program Hubungan Industrial	APBD	Bidang Hubungan Industrial
5.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	APBD	Bidang Transmigrasi
6.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	APBD	
7.	Program Pengembangan Kawasan	APBD	

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Untuk mewujudkan Visi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kesempatan dan perluasan kerja bagi pencari kerja		Tingkat Kesempatan Kerja	95,06	95,35	95,6	95,75	95,90
		Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing,	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat Kompetensi	300 Orang (14,75)	300 Orang (18,59)	300 Orang (22,43)	300 Orang (26,27)	300 Orang (30,11)
		Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	6,41	8,39	10,37	12,35	14,33

		Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya partisipasi Pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.		Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di rencanakan	2	4	4	5	5
		Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di rencanakan	2	4	4	5	5
			Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di tetapkan	1	1	1	1	1
			Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di Bangun	0	0	0	1	2
			Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di Kembangkan	0	0	0	0	1

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang berkualitas dan melayani		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	71,30	71,50	73,00	75,30	75,3
		Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.	Predikat akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.	71,30	71,50	73,00	75,30	75,3

Untuk mencapai Misi Dinas telah ditetapkan Indek Kinerja Utama (IKU) sebagai alat mengukur sekaligus pedoman dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan urusan wajib ketenagakerjaan dan urusan pilihan ketransmigrasian dengan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut:

1. Tujuan :

   Peningkatan kompetensi pencari kerja yang bersertifikat terlatih dan berdaya saing sesuai kebutuhan pasar kerja (Kukar siap Kerja).

   dengan

   Sasaran :

   a. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
   b. Meningkatnya Pencari Kerja yang diterima di pasar kerja.
   c. Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis.

2. Tujuan :

   Pengembangan kawasan partumbuhan ekonomi baru berbasis pertanian. dengan

   Sasaran :

   Meningkatkan penyediaan dan penataan kawasan desa/Kimtrans.

3. Tujuan :

   Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang berkualitas dan melayani dengan

   Sasaran :

   Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 disusun dengan memperhatikan : Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, dengan Visi : "Mewujudkan Masyarakat kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia", dan Misi ke-2 yaitu Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya, dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah "PROGRAM KUKAR SIAP KERJA".

4.2 Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan kecamatan dijabarkan sebagaimana dalam tabel pencapaian, kajian usulan program/kegiatan dari masyarakat dan penggabungan Prioritas masukan masyarakat serta dengan Perubahan Renja OPD terdahulu.

Bertolak pada Visi, Misi Tujuan dan Program yang dilaksanakan RPJMD Tahun 2016-2021 secara rasional akan menyentuh segala aspek dalam sebuah sistem organisasi, baik aspek internal (Dinas) maupun aspek eksternal (Masyarakat). Seperti dijelaskan dalam Program diatas, aspek eksternal yang dimaksud adalah masyarakat itu sendiri sebagai subyek sekaligus obyek dari pelayanan yang diberikan.

Apabila aspek internal dapat dicapai maka aspek eksternal akan secara otomatis tercapai. Kita analogikan seperti pelayanan yang terjadi dalam perusahaan swasta maupun nasional, betapa petugas memberi layanan sangat bersahabat sekali sehingga penerima layanan merasa seperti raja, segala kebutuhan yang diinginkan penerima layanan dapat dengan cepat dan cermat dipenuhi oleh pemberi layanan.

4.3 Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2025 terdiri atas 7 (Tujuh) Program dan 20 (Dua Puluh) Kegiatan, dan 60 (Enam Puluh) Sub Kegiatan Pendukung pelaksanaan Sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Sasaran Program : Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

   Pagu Anggaran : Rp. 15.984.584.926,-

   Kegiatan :

   a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Pagu Anggaran Rp1.000.000.000,-
   b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      Pagu Anggaran Rp9.524.673.039,-
   c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
      Pagu Anggaran Rp105.000.000,-
   d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
      Pagu Anggaran Rp505.000.000,-
   e) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
      Pagu Anggaran Rp529.700.000,-
   f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
      Pagu Anggaran Rp600.000.000,-
   g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
      Pagu Anggaran Rp1.044.919.9546.-
   h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
      Pagu Anggaran Rp 526.041.931,-

2. Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

   Sasaran Program : Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing,

   Pagu Anggaran : Rp7.153.540.000,-

Kegiatan :

a) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.
   Pagu Anggaran Rp7.053.540.000,-
b) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
   Pagu Anggaran : Rp25.000.000,-
c) Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil.
   Pagu Anggaran : Rp25.000.000,-
d) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   Pagu Anggaran : Rp50.000.000,-

3. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Sasaran Program : Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru.

Pagu Anggaran : Rp450.000.000,-

Kegiatan :

a) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
   Pagu Anggaran : Rp450.000.000,-

4. Program Penempatan Tenaga Kerja

Sasaran Program : Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru.

Pagu Anggaran : Rp5.300.000.000,-

Kegiatan :

a) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota.
   Pagu Anggaran : Rp4.950.000.000,-
b) Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   Pagu Anggaran ; Rp50.000.000,-
c) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
   Pagu Anggaran : Rp300.000.000,-

5. Program Hubungan Industrial

Sasaran Program : Meningkatnya hubungan Industrial yang harmonis dan Dinamis

Pagu Anggaran : Rp11.386.704.000,-

Kegiatan :

a) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pagu Anggaran : Rp462.000.000,-

b) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

Pagu Anggaran : Rp10.924.704.000,-

6. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Sasaran Program : Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru

Pagu Anggaran : Rp650.000.000,-

Kegiatan :

a) Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi.

Pagu Anggaran: Rp650.000.000,-

7. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Sasaran Program : Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru.

Pagu Anggaran : Rp. 750.000.000,-

Kegiatan :

a) Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian.

Pagu Anggaran : Rp750.000.000,-

Dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan publik dan peningkatan sumber daya aparatur Dinas Trasnmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dapat disusun Program dan Kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah, program urusan wajib dan program urusan pilihan seperti pada Tabel dibawah ini :

Tabel 5 T-C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		75,30	15.984.584.926			75,30	14.374.784.562
I		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8 Dokumen	1.000.000.000			6 Dokumen	250.000.000
1		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	-
2		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorl Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	1 Data	250.000.000	APBD		1 Data	-

3					Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	1 Berita Acara	50.000.000	APBD		1 Berita Acara	-
4					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	3 Dokumen	450.000.000	APBD		3 Dokumen	150.000.000
5					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Distransnaker Kab. Kukar	45 Dokumen	-	APBD		45 Dokumen	-
No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	-
7					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Distransnaker Kab. Kukar	2 Laporan	150.000.000	APBD		3 Laporan	100.000.000
II					Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan		1 Laporan		APBD		1 Laporan	

					Perangkat Daerah	Perangkat Daerah			9.524.673.039				11.144.122.675
8					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Distransnaker Kab. Kukar	69 orang/ bulan	9.324.673.039	APBD		83 orang/ bulan	10.994.122.675
9					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	1 Laporan	25.000.000	APBD		1 Laporan	
10					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	1 Laporan	150.000.000	APBD		1 Laporan	150.000.000
11					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Distransnaker Kab. Kukar	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	
III					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan		1 Laporan	105.000.000	APBD		1 Laporan	75.000.000
12					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	-

13					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi	Distransnaker Kab. Kukar	1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	-
No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Penilaian Barang Milik Daerah SKPD							
14					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	1 Laporan	30.000.000	APBD		1 Laporan	75.000.000
IV					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Sipil Negara		124 Orang	505.000.000			124 Orang	505.000.000
15					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Distransnaker Kab. Kukar	83 Orang	100.000.000	APBD		83 Orang	-
16					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Distransnaker Kab. Kukar	83 Orang	-	APBD		83 Orang	200.000.000
17					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Distransnaker Kab. Kukar	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	-
18					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan	Distransnaker Kab. Kukar	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	-

						Penilaian Kinerja Pegawai						
19					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Distransnaker Kab. Kukar	10 Orang	150.000.000	APBD		10 Orang	150.000.000
20					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Distransnaker Kab. Kukar	69 Orang	50.000.000	APBD		83 Orang	100.000.000
21					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Distransnaker Kab. Kukar	20 Orang	55.000.000	APBD		20 Orang	55.000.000
V					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		8 Layanan	529.700.000	APBD		8 Layanan	529.700.000
22					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	1 Paket	29.700.000	APBD		1 Paket	29.700.000

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

23					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	1 Paket	50.000.000	APBD		1 Paket	50.000.000
24					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	1 Paket	50.000.000	APBD		1 Paket	50.000.000
25					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	1 Paket	50.000.000	APBD		1 Paket	50.000.000
26					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	1 Paket	50.000.000	APBD		4 Paket	50.000.000
27					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	2 Paket	25.000.000	APBD		2 Paket	25.000.000
28					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Distransnaker Kab. Kukar	1 Laporan	25.000.000	APBD		1 Laporan	25.000.000
29					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Distransnaker Kab. Kukar	12 Laporan	250.000.000	APBD		12 Laporan	250.000.000
VI					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah		2 Unit	2.749.250.000	APBD		2 Unit	300.000.000
30					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	6 Unit	2.149.250.000	APBD		6 Unit	-
31					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	Distransnaker Kab. Kukar	3 Unit	-	APBD		3 Unit	-

					Lapangan	Lapangan yang Disediakan						
32					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	15 Unit	600.000.000	APBD		15 Unit	300.000.000
VII					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 Bulan	1.044.919.956	APBD		12 Bulan	1.044.919.956
33					Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan	Distransnaker	12 Laporan		APBD		12 Laporan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Kab. Kukar		4.000.000				4.000.000
34					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	12 Laporan	300.000.000	APBD		12 Laporan	300.000.000
35					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	12 Laporan	69.867.000	APBD		12 Laporan	69.867.000

36					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Distransnaker Kab. Kukar	12 Laporan	671.052.956	APBD		12 Laporan	671.052.956
VIII					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang di pelihara		30 Unit	526.041.931	APBD		30 Unit	526.041.931
37					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Distransnaker Kab. Kukar	21 Unit	276.041.931	APBD		24 Unit	276.041.931
38					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Distransnaker Kab. Kukar	3 Unit	-	APBD		3 Unit	-
39					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Distransnaker Kab. Kukar	1 Unit	-	APBD		1 Unit	100.000.000
40					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Distransnaker Kab. Kukar	1 Unit	150.000.000	APBD		1 Unit	150.000.000
41					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Distransnaker Kab. Kukar	2 unit	100.000.000	APBD		2 unit	-

II					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		26,27	7.153.540.000	APBD		30,11	6.276.000.000
No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Penyediaan Pusat Latihan Tenaga Kerja KUKAR IDAMAN		3 Unit				3 Unit	
XI					Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan		589 orang	7.053.540.000	APBD		300 orang	6.176.000.000
42					Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kab. Kutai Kartanegara	589 Orang	7.053.540.000	APBD		300 orang	5.500.000.000
43					Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Kab. Kutai Kartanegara	20 Lembaga	-	APBD		20 Lembaga	50.000.000
44					Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana	Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	-	APBD		1 Unit	626.000.000

					Kabupaten/Kota	Pelatihan Kerja							
X					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang tersedia		15 Lembaga	25.000.000	APBD		15 Lembaga	50.000.000
45					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kab. Kutai Kartanegara	15 Lembaga	25.000.000	APBD		15 Lembaga	50.000.000
XI					Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang produktif		25 Perusahaan	25.000.000			25 Perusahaan	50.000.000
46					Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Kab. Kutai Kartanegara	25 Perusahaan	25.000.000	APBD		25 Perusahaan	50.000.000
XII					Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas		25 Persen	50.000.000			25 Persen	-
47					Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	-

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						tingkat Daerah							
III					PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cakupan Layanan Data Informasi Tenaga Kerja Di Wilayah Kecamatan		100%	450.000.000	APBD		100%	100.000.000

XIII					Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Data Rencana Tenaga Kerja Daerah		1 Dokumen	450.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
48					Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	300.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
49					Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro kabupaten/kota.	Kab. Kutai Kartanegara	20 Orang	150.000.000	APBD		20 Orang	-
IV					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam/Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten		12,35%	5.300.000.000	APBD		14,33%	1.854.000.000
XIV					Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Antar Kerja		2 Layanan	4.950.000.000			2 Layanan	1.754.000.000
50					Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lainlain untuk Peningkatan Kompetensi	Kab. Kutai Kartanegara	60 Orang	300.000.000	APBD		30 Orang	75.000.000
51					Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kab. Kutai Kartanegara	50 Orang	100.000.000	APBD		25 Orang	50.000.000
52					Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	100 Orang	200.000.000	APBD		100 Orang	-
53					Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang	Kab. Kutai Kartanegara	30 Orang		APBD		30 Orang	

					Ketenagakerjaan	Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD			150.000.000				75.000.000
54					Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	671 Orang	4.200.000.000	APBD		155 Orang	1.554.000.000
No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
XV					Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	50.000.000	APBD		Dokumen	-
55					Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Kec. Tenggarong	10 Lembaga	50.000.000	APBD		10 Lembaga	-
XVI					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah informasi pasar kerja		1 Event	300.000.000	APBD		1 Event	100.000.000
56					Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	100 Orang	300.000.000	APBD		155 Orang	100.000.000
V					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitasi		100%	11.386.704.000	APBD		100%	400.000.000

XVII					Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja yang dicatatkan serta Perjanjian Kerja Bersama yang di daftarkan		28 Perusahaan	462.000.000			28 Perusahaan	200.000.000
57					Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kab. Kutai Kartanegara	25 Perusahaan	150.000.000	APBD		20 Perusahaan	100.000.000
58					Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kab. Kutai Kartanegara	25 Perusahaan	100.000.000	APBD		25 Perusahaan	-
59					Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kec. Tenggarong	2 Laporan	212.000.000	APBD		2 Laporan	100.000.000

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

XVIII					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan		65 Perusahaan	10.924.704.000	APBD		65 Perusahaan	200.000.000
60					Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Muara Muntai , Loa Janan , Sebulu , Kembang Janggut , Muara Kaman , Samboja , Muara Jawa , Sanga Sanga , Tenggarong Seberang	50 Perkara	200.000.000	APBD		15 Perkara	50.000.000
61					Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Kab. Kutai Kartanegara	100 Perkara	150.000.000			80 Perkara	50.000.000
62					Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kec. Tenggarong	6 Asosiasi	150.000.000			6 Asosiasi	50.000.000

					Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi								
63					Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kec. Tenggarong	1 Lembaga	100.000.000	APBD		1 Lembaga	50.000.000
64					Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Kutai Kartanegara	48.729 Orang	10.324.704.000	APBD		35.440 Orang	-
VI					PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang Direncanakan		1 Kawasan	650.000.000	APBD		1 Kawasan	300.000.000
No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
XIX					Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan		1 Dokumen	650.000.000			1 Dokumen	300.000.000

65					Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Sumber Sari , Giri Agung , Mekar Jaya , Sidomukti , Manunggal Jaya , Bukit Pariaman , Buana Jaya , Mulawarman , Suka Maju	2 Dokumen	650.000.000	APBD		2 Dokumen	-
66					Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Kab. Kutai Kartanegara	1 Kawasan	-	APBD		1 Kawasan	100.000.000
67					Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen penyediaan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	100.000.000
68					Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	100.000.000
VII					PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan Desa/Kimtrans yang bangun		1 Kawasan	-			1 Kawasan	500.000.000
XX					Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya		1 Kawasan	-			1 Kawasan	500.000.000

69					Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	40 Laporan	-	APBD		40 Laporan	100.000.000
70					Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan	Kab. Kutai Kartanegara	50 Dokumen	-	APBD		50 Dokumen	200.000.000
No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Layak Berkembang)							
71					Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah penataan pemukiman disekitar Lokasi Kawasan	Kab. Kutai Kartanegara	200 KK	-	APBD		200 KK	200.000.000
VIII					PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan Desa/Kimtrans yang dikembangkan		1 Kawasan	750.000.000			1 Kawasan	150.000.000
XXI					Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Rencana pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans		1 Dokumen	750.000.000			1 Kawasan	150.000.000

72					Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Jonggon Desa , Margahayu , Panca Jaya , Bunga Jadi	70 KK	450.000.000	APBD		40 KK	150.000.000
73					Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Sidomukti , Cipari Makmur	2 Satuan Permukiman	300.000.000	APBD		2 Satuan Permukiman	-
JUMLAH									41.674.828.926				23.954.784.562

Berdasarkan tabel diatas hasil analisis kebutuhan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, pagu anggaran yang dialokasikan untuk Program dan Kegiatan yaitu sebesar Rp41.674.828.926,- dan perkiraan maju rencana tahun 2026 sebesar Rp.23.954.784.562,- (Sesuai RENSTRA-PD).

BAB V
P E N U T U P

5.1 Catatan Penting Pelaksanaan Program Kegiatan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah urusan tenaga kerja, yang mengacu pada RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, dan Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2021 – 2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2025, merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tertuang dalam program prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang memuat tentang arah kebijakan, program kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dan pagu indikatif dan perkiraan maju tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasiil tersebut. Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi ditingkat Pelaksanaan sehingga target kinerja rencana strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dicai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana tetapi juga meliputi tahapan pengendalian Pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil Pelaksanaan rencana karena itu prosedur standar pengendalian Pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil Pelaksanaan rencana harus diselengarakan sevara tepat syarat. Pengendalian Pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil Pelaksanaan rencana dan memudahkan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara untuk proving (membuktikan) kinerja dan untuk inproving (memperbaiki) kinerja.

Saat penjabaran renja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas

tahapan Pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian program.

Selain itu perencanaan teknis Pelaksanaan tiap-tiap subkegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan Upaya

sinergi dengan para pihak yang terkait lainya, baik dilingkungan pemerintah maupun diluar pemerintahan.

Evaluasi Pelaksanaan renja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalisasi pencapaian target tahunan Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, yang memuat program kegiatan untuk mencapai sasaran Pembangunan tahun 2025, didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas, yang mengacu pada kaidah-kaidah Pelaksanaan sebagai berikut ;

1. Rencana Kerja mengacu pada :
   a. Program Pembangunan Nasional;
   b. RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
   c. Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2021 – 2026;
   d. RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024;
   e. Hasil evaluasi Pelaksanaan kegiatan periode sebelumnya;
   f. Berdasarkan program kegiatan atau kamus usulan yang berasal dari Masyarakat.
2. Rencana Kerja memuat :
   a. Sasaran dan indicator kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
   b. Program dan kegiatan;
   c. Indikator kinerja;
   d. Rencana tingkat capaian (target);
   e. Pagu indikatif dan perkiraan maju.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga

Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, disusun untuk mendukung pencapaian indikator sasaran dalam Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021- 2026, serta RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

5.3 Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Tindak Lanjut yang direkomendasikan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebagai berikut :

1. Penetapan prioritas Pembangunan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian secara terkoordinir, terintegrasi, dan sinergi serta berkelanjutan;
2. Peningkatan partisipasi aktif Masyarakat/swasta dalam program Pembangunan urusan ketenagekerjaan dan ketransmigrasian ;
3. Pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka mendudkung pencapaian indikator kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
4. Adanya Upaya peningkatan kinerja berdasarkan hasil monitoring dan eva;uasi rencana kerja.

Demikian Penyusunan Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penganggaran urusan ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang menjadi tugas dan fungsi Dinas

s.RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Undang undang 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Nasional, maka setiap pembangunan seyogyanya harus diselenggarakan melalui sebuah perencanaan yang sistematis dan terstruktur. Dan perencanaan tersebut harus dituangkan dalam sebuah dokumen yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Untuk menjalankan amanat undang - undang tersebut, maka perencanaan pembangunan didaerah disusun melalui mekanisme penyerapan aspirasi, mengakomodasi kepentingan nasional serta kebutuhan daerah itu sendiri, selanjutnya dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Tahunan (RPT). Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004). Untuk membantu pelaksanaan tujuan RPJMD tersebut, maka Organisasi Perangkat Daerah membuat Rencana Strategis (RENSTRA) dan difokuskan lagi pada Rencana Kerja Tahunan dengan dituangkan dalam sebuah dokumen Rencana Kerja (RENJA) yang berpedoman pada RPJMD dan RENSTRA OPD.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara (DINAS PMD Kutai Kartanegara) mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA OPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi dan program OPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) OPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ;
2. RENJA OPD merupakan acuan atau pedoman bagi OPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA–PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025;
3. RENJA OPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan OPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja OPD.

Mengingat arti strategis RENJA OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA DINAS PMD Tahun 2025 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang;
4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA DINAS PMD Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa;
15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2006 Tentang BPD;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.
28. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
29. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Penyusunan RENJA DINAS PMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2024 (tahun berjalan) dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) DINAS PMD Kutai Kartanegara Tahun 2025.

1.3.2 TUJUAN

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA DINAS PMD Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan RENJA DINAS PMD Kutai Kartanegara Tahun 2025 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN,

berisi tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU,

Berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Renstra OPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN

berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja OPD.

BAB I V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisi tentang : Program dan Kegiatan untuk proyeksi Tahun Anggaran 2025

BAB V PENUTUP :

Catatan Penting, Kaidah-kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PMD TAHUN 2023

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA-PD :

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA DINAS PMD Tahun 2023 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 yang sudah terinput pada Aplikasi E-Pantau bahwa yang sudah terealisasi sesuai dengan rencana dapat disampaikan sebagai berikut :
   a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan secara umum capaian target kinerja tercapai sebesar 100%
   b) Program Penataan Desa, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan secara umum capaian target kinerja tercapai sebesar 100%.
   c) Program Peningkatan Kerjasama Desa, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan secara umum capaian target kinerja tercapai sebesar 100%.
   d) Program Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 15 (lima belas) Sub Kegiatan secara umum capaian target kinerja tercapai sebesar 99,0%.
2. Realisasi Program/Kegiatan yang masih belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

   a) Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan capaian Kinerja Program Sebesar 99,0%. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

   1. Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 99,0%.
   2. Sub Kegiatan : Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa dengan capaian kinerja sebesar 85%, dimana indikator sub kegiatan adalah : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa dengan Target 37 Dokumen, namun capaian kinerja yang terealisasi adalah hanya 21 Dokumen, ada 16 Dokumen yang belum

teralisasi yaitu pembentukan Klinik Desa di 16 Kecamatan yang belum terbentuk dikarenakan terkendala belum terbitnya Peraturan Bupati tentang Klinik Konsultasi Desa Idaman.

3. Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor :

Untuk dapat mewujudkan capaian target kinerja yang maksimal sangat diharapkan adanya peningkatan kinerja secara signifikan OPD sehingga kegiatan dapat berjalan dan mencapai sasaran serta dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dan dapat melaksanakan program wajib dari pemerintah baik berupa program melekat maupun program bantuan yang diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kemudian perlunya peningkatan SDM, dan selanjutnya perlu dilakukan melalui kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi secara terpadu dan berkala serta berkesinambungan melalui pelatihan-pelatihan khususnya dalam bentuk pelatihan Penyusunan Program Kerja OPD, sehingga program dan kegiatan bidang dapat terintegrasi diantara semua bidang. Untuk pencapaian kinerja yang maksimal dibutuhkan sarana prasarana yang memadai yaitu diperlukannya gedung kantor yang memadai.

Untuk melihat secara lebih jelas tentang hal hal yang dipaparkan diatas, dapat perhatikan sebagaimana disajikan pada tabel data sebagai berikut :

Tabel T.C-29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Lembar:

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									

2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	85	88	80	88	110,00	82	258,00	3,04
2	*13*	*01*	*2.01*		*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100,00*	*100*	300,00	3,00
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48	9	6	6	100,00	4	19	0,40
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	3	3	100,00	5	8	0,00
2	*13*	*01*	*2.02*		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel*	*60*	*12*	*12*	*12*	*100,00*	*12*	*36*	*0,60*
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13910	2588	2782	2682	96,41	1582	6852	0,49
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	12	14	14	100,00	12	38	0,63

2	*13*	*01*	*2.03*		*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*5*	*1*	*1*	*1*	*100,00*	*5*	*7*	*1,40*
2	13	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	0	1	0	0,00	5	5	1,00
2	*13*	*01*	*2.05*		*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*100*	*20*	*20*	*91*	*455,00*	*20*	*131*	*1,31*
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	222	22	210	277	131,90	50	349	1,57
2	*13*	*01*	*2.06*		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*100*	*17*	*17*	*17*	*100,00*	*17*	*51*	*0,51*
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	4	8	8	100,00	8	20	6,67

2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	2	3	3	100,00	3	8	8,00

2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	0	39	53	135,90	4	57	57,00
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	12	12	12	100,00	12	36	36,00
2	13	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	930	1	186	249	133,87	186	436	0,47
2	13	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13	0	2	2	100,00	50	52	4,00
2	*13*	*01*	*2.07*		*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100,00*	*100*	*300*	*3,00*
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	135	33	194	207	106,70	30	270	2,00
2	*13*	*01*	*2.08*		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*100*	*17*	*20*	*100*	*500,00*	*20*	*137*	*1,37*

2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	20	2	2	100,00	2	24	24,00
2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	2	3	3	100,00	3	8	8,00
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	12	12	12	100,00	12	36	36,00
2	*13*	*01*	*2.09*		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*100*	*17*	*20*	*65*	*325,00*	*20*	*102*	*1,02*
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	95	5	26	4	15,38	5	14	0,15

2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	0	0	0	0,00	3	3	0,00

2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	415	33	70	149	212,86	20	202	0,49
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilita si	1	1	1	1	100,00	0	2	2,00
2	13	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi	0	0	0	0	0,00	1	1	0,00
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	38,86	2	5,18	5	96,53	10	17	0,44
2	*13*	*02*	*2.01*		*Penyelenggaraan Penataan Desa*	*Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa*	*193*	*19*	*31*	*15*	*48,39*	*27*	61	0,32
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	19	6	9	13	144,44	3	22	1,16

2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	10	0	10	10	100,00	2	12	1,20

2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	50	10	10	19	190,00	10	39	0,78
2	13	02	2.01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	21	6	3	9	300,00	3	18	0,86
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	50	10	3	3	100,00	2630	2643	52,86
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	100	100	100	10	10,00	100	220	2,20
2	*13*	*03*	*2.01*		*Fasilitasi Kerja Sama antar Desa*	*Jumlah Kerjasama Desa yang difasilitasi*	*193*	*64*	*106*	*13*	*12,26*	*57*	134	0,69
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	5	1	9	10	111,11	12	23	4,60
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	20	2	2	2	100,00	6	10	0,50
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	10	2	3	3	100,00	5	10	1,00

2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik	95	50	70	67	95,71	95	212	2,23

						Persentase Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	50	10	10	5	50,00	30	45	0,90
2	*13*	*04*	*2.01*		*Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*	*Jumlah Desa yang dibina dan diawasi*	*193*	*193*	*193*	*180*	*93,26*	*193*	566	2,93
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	40	7	8	8	100,00	8	23	0,58
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	30	13	5	3	60,00	8	24	0,80
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	140	28	1	1	100,00	1	30	0,21
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	150	23	50	50	100,00	40	113	0,75
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	193	193	104	116	111,54	32	341	1,77

2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	75	15	14	14	100,00	14	43	0,57

2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	193	2	198	198	100,00	82	282	1,46
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	270	13	23	23	100,00	23	59	0,22
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	5	1	20	20	100,00	42	63	12,60
2	13	04	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	2	6	37	21	56,76	43	70	35,00
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	125	15	54	20	37,04	54	89	0,71
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	640	220	1257	1257	100,00	230	1707	2,67
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	75	11	34	39	114,71	15	65	0,87

2	13	04	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	1	20	20	20	100,00	20	60	60,00

2	13	04	2.01	17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenanga n Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	3	1	0	0	0,00	1	2	0,67
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10	2	2	2	100,00	18	22	2,20
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100	100	100	100	100,00	100	300	3,00
						Persentase Posyandu Aktif	70,35	49	51,51	92	178,61	70	211	3,00

2	#	*05*	*2.01*		*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif*	*3826*	*4666*	*613*	*5*	*0,82*	*823*	5494	1,44

2	13	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	5	1	2	2	100,00	1	4	0,80
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5	2	19	19	100,00	18	39	7,80
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2590 orang	37949	7630	10426	136,64	7775	56150	#VALUE!

2	13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	300	44	26	26	100,00	1496	1566	5,22
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	15	3	4	4	100,00	3	10	0,67
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3	2	8	8	100,00	3	13	4,33
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	15	3	4	4	100,00	1	8	0,53

2	13	05	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	5	1	0	0	0,00	1	2	0,40
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	25	3	8	9	112,50	8	20	0,80

Dari tabel tersebut dapat dilihat tingkat signifikasi, capaian dan kesesuaian realisasi antara capaian kinerja Program, Kegiatan dengan Sub Kegiatan maka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Kesesuaian Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		KETERANGAN
				Kinerja	%		Anggaran (Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	80	88	110,00	21.764.310.173	20.167.045.179	92,66	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*100*	*100*	100,00	*597.212.400*	*593.539.424*	99,38	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	100,00	397.212.400	393.610.724	99,09	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	100,00	200.000.000	199.928.700	99,96	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel*	*12*	*12*	100,00	*12.373.050.850*	*11.144.946.376*	90,07	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3250	2682	82,52	12.083.510.082	10.863.800.876	89,91	

4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	14	14	100,00	289.540.768	281.145.500	97,10	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1*	*1*	100,00	*46.860.000*	*46.860.000*	100,00	
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0	0,00	46.860.000	46.860.000	100,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*20*	*91*	455,00	*749.026.000*	*744.883.306*	99,45	
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	210	277	131,90	749.026.000	744.883.306	99,45	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*17*	*17*	100,00	*1.718.722.600*	*1.681.823.950*	97,85	
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	8	100,00	503.781.000	503.024.450	99,85	

8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	100,00	50.000.000	49.925.000	99,85	

9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	39	53	135,90	300.000.000	296.723.300	98,91	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100,00	475.000.000	442.615.500	93,18	
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	186	249	133,87	281.521.600	281.115.700	99,86	
12	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	2	100,00	108.420.000	108.420.000	100,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah*	*100*	*100*	100,00	*3.708.261.000*	*3.624.186.400*	97,73	
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	194	207	106,70	3.708.261.000	3.624.186.400	97,73	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*20*	*100*	500,00	*1.400.652.323*	*1.365.021.655*	97,46	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	2	100,00	191.112.847	187.113.054	97,91	

15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	100,00	229.455.000	200.967.100	87,58	
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100,00	980.084.476	976.941.501	99,68	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*20*	*65*	325,00	*1.170.525.000*	*965.784.068*	82,51	
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26	4	15,38	718.565.000	542.075.698	75,44	
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	70	149	212,86	51.960.000	51.960.000	100,00	
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1	1	100,00	400.000.000	371.748.370	92,94	
	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	5,18	5	96,53	1.312.052.000	964.644.577	73,52	

	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa*	*31*	*15*	48,39	*1.312.052.000*	*964.644.577*	73,52	
20	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	9	13	144,44	97.052.000	70.043.400	72,17	
21	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	10	10	100,00	700.000.000	549.761.970	78,54	
22	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	10	19	190,00	100.000.000	55.116.500	55,12	
23	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	3	9	300,00	50.000.000	43.726.000	87,45	
24	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	3	3	100,00	365.000.000	245.996.707	67,40	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	100	10	10,00	1.608.948.000	1.318.971.977	81,98	
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Jumlah Kerjasama Desa yang difasilitasi*	*106*	*13*	12,26	*1.608.948.000*	*1.318.971.977*	81,98	
25	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	9	10	111,11	858.948.000	582.451.477	67,81	

26	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	2	2	100,00	100.000.000	98.225.500	98,23	
27	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3	3	100,00	650.000.000	638.295.000	98,20	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik	70	67	95,71	26.741.035.828	25.484.353.507	95,30	
		Persentase Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	10	5	50,00				
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa yang dibina dan diawasi*	*193*	*180*	93,26	*26.741.035.828*	*25.484.353.507*	95,30	
28	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	8	8	100,00	100.000.000	85.802.000	85,80	
29	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5	3	60,00	100.000.000	54.071.268	54,07	
30	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1	1	100,00	120.000.000	117.561.500	97,97	

31	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	50	50	100,00	3.567.266.880	3.456.069.081	96,88	

32	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	104	116	111,54	464.888.948	441.591.484	94,99	
33	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	14	14	100,00	100.000.000	72.743.800	72,74	
34	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	198	198	100,00	1.954.800.000	1.911.371.165	97,78	
35	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	23	23	100,00	100.000.000	99.379.400	99,38	
36	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	20	20	100,00	170.000.000	130.347.500	76,68	
37	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	37	21	56,76	12.463.880.000	12.107.612.113	97,14	
38	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	54	20	37,04	1.623.000.000	1.569.226.946	96,69	
39	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1257	1257	100,00	5.177.200.000	4.898.195.484	94,61	

40	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	34	39	114,71	300.000.000	172.362.818	57,45	
41	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	20	20	100,00	100.000.000	54.986.000	54,99	
42	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	1		0,00	0	0	0,00	
43	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2	2	100,00	400.000.000	313.032.948	78,26	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100	100	100,00	30.716.903.680	29.589.545.644	96,33	
		Persentase Posyandu Aktif	51,51	92	178,61				

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif*	*613*	*5*	0,82	*30.716.903.680*	*29.589.545.644*	96,33	
44	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	2	2	100,00	347.047.000	306.299.800	88,26	
45	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	19	9	47,37	1.680.000.000	1.578.110.952	93,94	

46	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7630	10426	136,64	4.899.751.400	4.759.183.152	97,13	
47	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	26	26	100,00	11.054.593.280	10.789.366.551	97,60	
48	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	4	4	100,00	750.000.000	726.713.300	96,90	
49	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	8	8	100,00	2.493.901.000	2.286.777.005	91,69	
50	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4	4	100,00	805.913.000	740.620.000	91,90	

51	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	2		0,00	0		0,00	
52	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8	9	112,50	8.685.698.000	8.402.474.884	96,74	
JUMLAH						82.143.249.681	77.524.560.884	94,38	

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tujuan dan sasaran DINAS PMD yang tertuang dalam RENSTRA DINAS PMD Tahun 2021-2026 maka Analisis kinerja pelayanan DINAS PMD sesuai dengan RENSTRA DINAS PMD tertuang dalam capaian Sasaran Strategis tahun 2023 berdasarkan target dan capaian realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Penataan Desa, Program Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintah Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat, dapat dilihat analisis kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1			Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	10	10	10	0	0	100	100	0	0	0	Target sudah tercapai
2			Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	10	10	10	14,3	14,3	22,45	35,13	14,3	14,3	14,3	Capaian melebihi target
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)			77	80	82	84	85	87,7	88	82	84	85	Capaian melebihi target
4	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa			1,55	5,18	10,36	25,91	38,86	2	5	10,36	25,91	38,86	Capaian sesuai target
5	Persentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Capaian sesuai target
6	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik			50	70	80	90	95	50	67	80	90	95	Capaian sesuai target

7	Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa			10	10	10	10	10	10	5	10	10	10	Capaian kinerja di bawah target
8	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif			100	100	100	100	100	100	100	100	100	70,35	Capaian kinerja sesuai target
9	Persentase Posyandu Aktif			45,22	51,51	57,79	64,07	70,35	49	92	57,79	64,07	100	Capaian kinerja sesuai target

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

1. TINGKAT PELAYANAN DINAS PMD

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai PERBUP Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Melaksanakan perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
c. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
e. Mengkoordinasikan penyusunan laporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Kemudian pada RENSTRA DINAS PMD Tahun 2021-2026 dilakukan review berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 dan ditetapkan dengan Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan beberapa indikator utama yaitu :

1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)
2) Prosentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa
3) Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa
4) Prosentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik
5) Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa
6) Prosentase Posyandu Aktif
7) Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif

2. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH :

Secara struktur organisasi, saat ini DINAS PMD telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi yang disyaratkan, hal tersebut

telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan dan mengoordinasikan:
    1) Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; dan
    2) Subbagian Keuangan dan Aset.
c. Bidang Penataan Desa;
d. Bidang Kerjasama Desa;
e. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa;
g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
h. UPTD.

Dimana keempat bidang tersebut telah sesuai dan dapat mendukung fungsi-fungsi, walaupun membawa konsekuensi luas dalam aspek SDM dan fasilitas. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multidimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedepan, pengembangan kelembagaan DINAS PMD ditekankan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana di lembaga. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
Belum Optimalnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Akuntabel	Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Daya Saing Desa	1. Belum optimalnya penataan desa
		2. Masih perlu adanya penataan, kewenangan, penamaan, kode desa, sarana prasarana desa
		3. Adanya data sarana dan prasarana desa yang belum termutahirkan
		4. Ada beberapa desa yang belum akses air minum dan sanitasi yang layak
		5. 9 Desa yang belum adanya kajian terkait program terang kampongku
	Belum optimalnya Kerjasama Antar Desa	1. Belum teridentifikasinya potensi wilayah yang ditetapkan sebagai kerjasama kawasan pembangunan perdesaan
		2. Belum terfasilitasinya kerjasama desa berdasarkan potensi desa
	Belum optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Akuntabel	1. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa
		2. Belum dievaluasinya produk Hukum Desa
		3. Masih terdapat desa dalam menyusun Perencanaan Pembangunan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa belum sesuai dengan pedoman
		4. Belum terevaluasinya Profil Desa, Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan secara berkelanjutan
		5. Belum tepatnya unit usaha BUMDesa dengan potensi yang ada di desa
		6. Belum terfasilitasinya manajemen pemerintahan desa dengan baik
		7. Masih terdapat beberapa desa yang belum adanya kesepakatan tapal batas
	Belum optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan,	1. Belum terfasilitasinya kegiatan masyarakat hukum adat
		2. Perlu kontinuitas database LKD dan LAD
	Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Desa	3. Rendahnya kapasitas SDM kader LKD dan LAD
		4. Masih rendahnya kinerja Kelembagaan LKD, LAD
		5. Belum terfasilitasinya pengelolaan manajemen pasar desa kepada pemerintah desa dan pengelola pasar desa dalam peningkatan ekonomi masyarakat
		6. Kurangnya kesadaran gotong royong dan ketahanan masyarakat
		7. Masih rendahnya keterampilan dan pengetahuan kelompok usaha masyarakat dan rumah tangga miskin di pedesaan
		8. Minimnya fasilitasi kegiatan TTG

1) Belum jelasnya strategi pengembangan dan pelatihan, jenjang karir, penilaian kinerja, serta sistem kompensasi pegawai. Integrasi aspek- aspek tersebut merupakan kunci keberhasilan terciptanya sumber daya aparatur DINAS PMD yang mampu menjawab kompleksitas permasalahan dan dinamika perubahan yang terjadi ;
2) Belum meratanya kualitas dan kuantitas SDM DINAS PMD baik aspek perencanaan, pengendalian, data informasi dan penguasaan teknologi karena perencanaan yang berdaya guna dan berhasil guna sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparaturnya;
3) Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan perubahan kebijakan perencanaan daerah;
4) Semakin besarnya tuntutan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif, efesien, partisipatif, dan transparan berbasis teknologi termasuk aksesibilitas data dan informasi. Sedangkan akses informasi melalui jaringan internet masih belum dapat dimaksimalkan.

3. DAMPAK TERHADAP PENCAPAIAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Sesuai RPJMD Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Visi Kutai Kartanegara adalah:

"MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA"

Penjabaran makna dari MISI Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut adalah sebagai berikut :

MISI

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;

5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, maka disusunlah misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut : Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, DINAS PMD mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Dimana DPMD memiliki peranan terhadap tercapainya Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Keterkaitan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara itu terletak sebagaiman Visi dan Misi yang menjadi arah kebijakan Dinas PMD terletak pada :

a. Misi 1 : Memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani.
b. Misi 2 : Meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya serta, Misi
c. Misi 3 : Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif.
d. Misi 4 : Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah) RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sehingga DINAS PMD memiliki peranan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional.

4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PMD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Disamping beberapa permasalahan sebagaimana tersebut diatas, DINAS PMD memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mengawal Visi dan Misi Bupati. Dalam usaha pencapaian Visi dan Misi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki dinamika tantangan dan peluang sebagai berikut :

a) Pentingnya peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang didukung oleh peraturan yang berlaku ;
b) Pemberian porsi lebih anggaran sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada pembangunan desa;
c) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku leading sektor pembangunan di desa, sampai saat ini belum dilibatkan secara maksimal dalam pembuatan regulasi yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan dan pembangunan di desa.
d) Dinas PMD memiliki peranan dalam mengawal pelaksanaan RPJMD dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yaitu dengan tema : " Pemantapan Pemberdayaan Masyarakat untuk Akselerasi dan Transformasi Pembangunan ".

5. FORMULASI ISU-ISU PENTING :

- Pentingnya peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang didukung oleh peraturan yang berlaku, oleh karena itu peningkatan porsi keterlibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menyusun dan memformulasikan ketentuan dan peraturan yang mengarah kepada peningkatan capaian hasil dan peningkatan percepatan pembangunan di Desa/Kelurahan. Sehingga diharapkan peraturan (Perda/Perbup/SK Bupati) yang dihasilkan dapat terlaksana dan diharapkan menyentuh bagian terpenting dalam pemecahan permasalahan yang terjadi di desa. Hal ini didasarkan pada peranan langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun aparatur
  pemerintahan desa;
  a. Pemberian porsi lebih anggaran sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada pembangunan desa;
  b. Dinas PMD selaku leading sektor pembangunan di desa, sampai saat ini belum dilibatkan secara maksimal dalam pembuatan regulasi yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan dan pembangunan di desa.

c. Pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hal ini didasarkan pada realitas bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saat ini mengalami regenerasi. Peralihan Aparatur Sipil Negara yang disebabkan oleh habis masa kerjanya (pensiun/purna tugas) maupun yang disebabkan mutasi karena karir pegawai ke kantor lainnya, fenomena ini juga menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga eksistensi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai leading sektor dalam pengembangan dan pembangunan serta mengadvokasi masyarakat di desa.

2.4 REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

Bahwa berdasarkan hasil review Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dan hasil analisa kebutuhan capaian Target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun capaian target Kinerja program tahun 2025, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Rancangan Awal RKPD					RAPBD						Alasan Perubahan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	*KAB KUTAI KARTANEGARA*	*Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)*	*84 Nilai*	*17.073.530.833*	*PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA*		*Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)*	*84 Nilai*	*19.405.789.448*	*2.332.258.615*	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	450.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1.000.000.000	*550.000.000*	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong, Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	450.000.000	300.000.000	

2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	-	(50.000.000)	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	-	(50.000.000)	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	3 Laporan	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong, Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	3 Laporan	50.000.000	(50.000.000)	

			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	100.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong, Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	150.000.000	50.000.000	
6						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	
7						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan	1 Data	250.000.000	250.000.000	

								Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				
8						Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000	50.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	12 Laporan	14.215.280.193	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	12 Laporan	14.105.338.976	(109.941.217)	
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	2782 Orang/Bulan	13.990.280.193	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	2142 Orang/Bulan	13.855.338.976	(134.941.217)	

			Tunjangan ASN					Tunjangan ASN				
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000	-	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	200.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	200.000.000	-	

12						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	48.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	105.000.000	57.000.000	
13	Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	48.000.000	Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	(48.000.000)	
14						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	
15						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian	1 Laporan	50.000.000	50.000.000	

								Barang Milik Daerah SKPD				
16						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000	30.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20 Persen	250.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20 Persen	318.000.000		
17	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	364 Paket	100.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	112 Paket	168.000.000	68.000.000	Belum ada pengadaan pakaian dinas selama 10 tahun

18	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Jakarta Yogyakarta Malang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	105 Orang	150.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DKI Jakarta, Yogyakarta, Malang, Samarinda, Balikpapan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	150.000.000	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	23 Persen	574.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	23 Persen	574.000.000		
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	150.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	-	
20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	24.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.000.000	-	
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	6 Dokumen	50.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Tenggarong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	3 Dokumen	50.000.000	-	

	undangan	Kelurahan	Perundang-Undangan yang Disediakan			undangan		Perundang-Undangan yang Disediakan				
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta, Yogyakarta, Samarinda, Balikpapan, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	150.000.000	-	
23	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 Dokumen	100.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 Dokumen	100.000.000	-	
24	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	100.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	100.000.000	-	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	282.800.168	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	2.050.000.000		
25	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	232.800.168	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	2.000.000.000	1.767.199.832	Pengadaan kendaraan dinas Roda 4 Esselon 2 = 1 Unit dan Esselon 3 = 5 Unit (Sekretaris dan 4 Kepala Bidang)
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	322 Unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50.000.000	-	Pengadaan Filling Cabinet, CCTV,Scanner,Printer,PC,Laptop, AC Split 1 PK
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KAB KUTAI KARTANEGARA	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23 Persen	1.053.450.472	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23 Persen	1.053.450.472		

27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	100.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000	-	
28	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong, Sangasanga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50.000.000	-	
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	903.450.472	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	903.450.472	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	KAB KUTAI KARTANEGARA	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	23 Persen	200.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	23 Persen	200.000.000		

	Daerah		Pemerintahaan Daerah			n Daerah		Pemerintahaan Daerah				
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	50.000.000	-	
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit (1 Unit Roda 4, 23 Unit Roda 2, 2 Unit Sewa Mobil)	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	50.000.000	-	
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	157 Unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	65 Unit	50.000.000	-	

			dipelihara					dipelihara				
33	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	(50.000.000)	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor DPMD terdiri dari : Penyekatan dan Penambahan Interior = 5 Ruangan
34						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	50.000.000	
	PENATAAN DESA	*KAB KUTAI KARTANEGARA*	*Prosentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa*	*25,91 Persen*	*470.000.000*	*PENATAAN DESA*		*Prosentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa*	*25,91 Persen*	*1.850.000.000*		
	Penyelenggaraan Penataan Desa	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	27 Desa	470.000.000	Penyelenggaraan Penataan Desa		Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	27 Desa	1.850.000.000		

35	Pembentukan, Penghapusan, Penggabunga n, dan Perubahan Status Desa	Desa Tanjung Limau, Bukit Pariaman, Jantur, Jantur Selatan, Batuah, Jonggon Desa, Sebuntal	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabunga n dan Perubahan Status Desa	7 Desa	120.000.000	Pembentukan, Penghapusan, Penggabunga n, dan Perubahan Status Desa	Desa Tanjung Limau, Bukit Pariaman, Jantur, Jantur Selatan, Batuah, Jonggon Desa, Sebuntal	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabunga n dan Perubahan Status Desa	7 Desa	150.000.000	30.000.000	
36	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kec. Tabang, Muara Muntai, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan, Muara Badak, Marangkayu, Samboja, Samboja Barat	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	13 Desa	100.000.000	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Loleng,Sukabumi (Kota Bangun),Saliki (Muara Badak),Prangat Baru (Marangkayu),Muara Pedohon (Tabang),Lebah o Ulaq (Muara Kaman),Seleron g (Sebulu),Buana Jaya (Tgr Seberang),Muara Leka (Muara Muntai),Lebak Mantan (Muara Wis), Sepakat (Loa Kulu),	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	13 Desa	1.300.000.000	1.200.000.000	Pendampingan Penyusunan Tata Kelola Wilayah Desa dan Penyusunan Dokumen Perdes Tata Wilayah Desa

							Genting Tanah (Kembang Janggut),Purwajaya (Loa Janan)					
37	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	1 Desa di 18 Kecamatan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	18 Desa	100.000.000	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Desa Karyajaya,Kutai Lama,Bakungan, Kedang Ipil,Rebaq Rinding,Sungai Bawang,Semangko,Muara Pedohon,Lamin Pulut,Hambau,Bunga Jadi,Lekaq Kidau,Bhuana Jaya,Sebelimbingan,Lung Anai,Lebaq Cilong,Rapak Lambur,Batuah	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	18 Desa	150.000.000	50.000.000	

38	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa Kota Bangun I, Kota Bangun II, Kota Bangun III, Salo Cella, Jonggon Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	5 Desa	50.000.000	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Tani Bhakti (Samboja),Sido mulyo(Tabang), Tani Bhakti(Loa Janan),Sumber Sari (Kota Bangun),Sumber Sari(Sebulu),Sid omulyo(Anggana),Sumber Sari(Loa Kulu),Sungai Bawang(Muara Badak)	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	5 Desa	100.000.000	50.000.000	
39	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Desa Jembayan, Loa Duri Ulu, Sungai Payang, Kembang Janggut, Muara Badak Ulu, Bangun Rejo, Sepatin	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	7 Unit	100.000.000	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Genting Tanah (Kec. Kembang Janggut)	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	20 Unit	150.000.000	50.000.000	Penyediaan mebelair terdiri dari : 1. Kursi Kerja dan Meja Kerja 2 x 5 unit/desa x 138 = 1380 Unit 2. Meja Rapat 1 Unit/Desa =138 Unit 3. Kursi Rapat 13 Unit /desa x 138 = 1794 Unit

	PENINGKATA N KERJASAMA DESA	*KAB KUTAI KARTANEGA RA*	*Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa*	*100 Persen*	*350.000.000*	*PENINGKAT AN KERJASAMA DESA*		*Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa*	*100 Persen*	*500.000.000*		
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	KAB KUTAI KARTANEGA RA	Jumlah Kerjasama Desa yang difasilitasi	57 Desa	350.000.000	Fasilitasi Kerja sama antar Desa		Jumlah Kerjasama Desa yang difasilitasi	57 Desa	500.000.000		
40	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kot a	Kecamatan Loa Janan : Bakungan, Loa Duri Ulu, Loa Janan Ulu, Purwajaya, Tani Bakti, Batuah, Loa Duri Ilir, Tani Harapan Kecamatan Loa Kulu : Jonggon, Sungai Payang, Jembayan, Loa Kulu Kota, Loh Sumber, Ponoragan,	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Ko ta	6 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Ko ta	Kec. Muara Badak: Desa Saliki.Salo Palai,Muara Badak Ulu,Muara Badak Ilir,Tanjung Limau,Tanah Datar,Badak Baru,Suka Damai,Gas Alam Badak I,Batu-Batu,Badak Mekar,Salo Cella,Sungai Bawang, Kec. Marangkayu:Des a Perangat Baru,Bunga Putih,Semangko	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Ko ta	7 Dokumen	250.000.000	150.000.000	

		Rempanga, Margahayu, Jonggon Jaya, Long Anai, Jembayan Tengah, Jembayan Dalam, Sepakat, Sumber Sari, Jongkang. Kecamatan Anggana : Sepatin, Muara Pantuan, Tani Baru, Kutai Lama, Anggana, Sungai Meriam, Sidomulyo, Handil Terusa Kecamatan Kenohan : Lamin Telihan, Lamin Pulut, Teluk					,Prangat Baru,Prangat Selatan, Kersik,Santan Ulu,Santan Tengah,Santan Ilir,Makarti,Sebuntal,					

		Bingkai, Kahala, Tubuhan, Semayang, Teluk Muda, Tuana Tuha, Kahala Ilir.										
41	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kecamatan Loa Janan : Bakungan, Loa Duri Ulu, Loa Janan Ulu, Purwajaya, Tani Bakti, Batuah, Loa Duri Ilir, Tani Harapan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kec. Tgr Seberang:Desa Separi,Kerta Buana,Bukit Pariaman,Buana Jaya, Suka Maju, Kec. Loa Kulu:Desa Loh Sumber,Jembayan Tengah,Sumber Sari,Ponoragan,	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen	-	(100.000.000)	

		Kecamatan Loa Kulu : Jonggon, Sungai Payang, Jembayan, Loa Kulu Kota, Loh Sumber,					Sepakat,Rempanga, Kec. Sebulu:Desa Manunggal Daya,Mekar Jaya,Sumber Sari,Kec. Muara Kaman:Panca					

		Ponoragan, Rempanga, Margahayu, Jonggon Jaya, Long Anai, Jembayan Tengah, Jembayan Dalam, Sepakat, Sumber Sari, Jongkang. Kecamatan Anggana : Sepatin, Muara Pantuan, Tani Baru, Kutai Lama, Anggana, Sungai Meriam, Sidomulyo, Handil Terusa Kecamatan Kenohan : Lamin Telihan, Lamin Pulut, Teluk Bingkai, Kahala, Tubuhan, Semayang, Teluk Muda, Tuana Tuha, Kahala Ilir					Jaya,Sido Mukti,Cipari Makmur,Bunga Jadi,Kec. Tgr Seberang:Desa Embalut,Bangun Rejo,Manunggal Jaya,Karang Tunggal,Bukit RayaTanjung Batu,Loa Lepu,Kec. Marangkayu:Des a Prangat Baru,Prangat Selatan,Makarti, Bunga Putih,Sambera Baru					

42	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kec. Loa Kulu:Desa Jembayan Tengah,Loh Sumber,Sumb er Sari,Ponoragan,Sepakat,RempangaKec. Sebulu:Desa Manunggal Daya,Mekar Jaya,Sumber Sari Kec. Muara Kaman:Desa Panca Jaya,Sidomukti,Cipari Makmur, Bung a	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	6 Dokumen	150.000.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kec. Loa Kulu:Jembayan Tengah,Loh Sumber,Sumber Sari,Ponoragan, Sepakat,Rempa nga Kec.Sebulu: Manunggal Daya,Mekar Jaya,Sumber Sari Kec. Muara Kaman:Panca Jaya,Sidomukti, Cipari Makmur,Bunga Jadi Kec.Tgr Seberang:Embalut,Bangun Rejo,Manunggal Jaya,Karang Tunggal,Bu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	7 Dokumen	250.000.000	100.000.000

		Jadi Kec.Tgr Seberang: Des a Embalut, Bang un Rejo,Man ungg al Jaya,Kar ang Tunggal, Bukit Raya,Tanj ung Batu,Loa Lepu,Kert abu ana,Buan a Jaya,Buk it Pariaman ,Suk a Maju,Sep ari Kec.Mara ngka yu:Desa Semangk o,Se buntal,Sa ntan Ulu,					kit Raya,Tanju ng Batu,Loa Lepu,Kerta buan a,Buana Jaya,Bukit Pariaman,S uka Maju,Separ i Kec.Marang kayu :Semangko, Seb untal,Santa n Ulu, Perangat Baru,Maka rti,Per angat Selatan, Bunga Putih, Sambera Baru Kec.Tengga rong			

		Perangat Baru,Makarti, Perangat Selatan, Bunga Putih, Sambera Baru									
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	*KAB KUTAI KARTANEGARA*	*Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Kategori Baik*	*90 Persen*	*9.456.085.828*	*ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA*		*Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Kategori Baik*	*90 Persen*	*24.226.693.870*	

			Persentase Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	*10 Persen*				*Persentase Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa*	*10 Persen*			
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi	193 Desa	9.456.085.828	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Desa yang dibina dan diawasi	193 Desa	24.226.693.870		
43	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa Tanjung Limau, Bukit Pariaman, Jantur, Jantur Selatan, Batuah, Jonggon Desa, Sebuntal	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	7 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa Tanjung Limau, Bukit Pariaman, Jantur, Jantur Selatan, Batuah, Jonggon Desa, Sebuntal	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	7 Dokumen	-	(100.000.000)	
44	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	10 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	110 Dokumen	100.000.000	-	

45	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	120.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	250.000.000	130.000.000	
46	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	38 Dokumen	2.716.085.828	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Samarinda	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	389 Dokumen	7.885.720.910	5.169.635.082	Pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat dan BPD
47	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Tenggarong	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	108 Orang	100.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Tenggarong	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	72 Orang	200.000.000	100.000.000	

48	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kec. Tabang: Muara Salung Kec. Kenohan:Kahala,Teluk Bingkai,Kahala Ilir,Tubuhan Kec.Kota Bangun Darat:Sedulang,Kota Bangun III,Sumber Sari Kec. Kota Bangun:Loleng,Pela,Sebelimbingan Kec.Loa Janan:Loa Duri Seberang Kec. Loa Kulu:Jembayan Ilir Kec. Muara Badak: Tanjung Limau,Muara Badak Ulu	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	15 Dokumen	100.000.000	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kec. Tabang: Muara Salung Kec. Kenohan:Kahala,Teluk Bingkai,Kahala Ilir,Tubuhan Kec.Kota Bangun Darat:Sedulang, Kota Bangun III,Sumber Sari Kec. Kota Bangun:Loleng, Pela,Sebelimbingan Kec.Loa Janan:Loa Duri Seberang Kec. Loa Kulu:Jembayan Ilir Kec. Muara Badak: Tanjung Limau,Muara Badak Ulu	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	15 Dokumen	-	(100.000.000)	

49	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	198 Dokumen	100.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara, Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	198 Dokumen	1.100.000.000	1.000.000.000	

50	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kec.Muara Muntai:Kayu Batu,Muara Aloh,Jantur Selatan,Pulau Harapan,Jantur,Ma.Muntai Ulu,Jantur Baru,Muara Leka,Batuq;Kec.Loa Kulu:Sepakat, Jongkang,Sumber Sari,Loa Kulu Kota,Loh Sumber,Ponoragan,Rempanga,Jonggon Jaya,Lung Anai;Kec.Loa Janan:Batuah, Bakungan,Loa Duri Ulu,Loa Janan Ulu,Purwajaya,Tani Bhakti,Loa Duri Ilir;Kec.Anggana:Ma.Pantuan,Tani Baru,Sungai	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	111 Laporan	5.000.000.000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kec.Muara Muntai:Kayu Batu,Muara Aloh,Jantur Selatan,Pulau Harapan,Jantur,Ma.Muntai Ulu,Jantur Baru,Muara Leka,Batuq;Kec.Loa Kulu:Sepakat,Jongkang,Sumber Sari,Loa Kulu Kota,Loh Sumber,Ponoragan,Rempanga,Jonggon Jaya,Lung Anai;Kec.Loa Janan:Batuah,Bakungan,Loa Duri Ulu,Loa Janan Ulu,Purwajaya,Tani Bhakti,Loa Duri Ilir;Kec.Anggana:Ma.Pantuan,Tani Baru,Sungai Mariam,Sidomulyo,Handil	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	111 Laporan	-	(5.000.000.000)	

		Mariam,Sidomulyo,Handil Terusan;Kec. Ma.Badak:Ma. Badak Ulu,Gas Alam Badak I,Badak Baru,Saliki,Salo Palai,Tanah Datar,Batu-Batu;Kec.Tgr: Bendang Raya;Kec.Sebulu:Sebulu Ilir,Giri Agung,Mekar Jaya,Sebulu Ulu,Sebulu Modern,Seleron g,Tj.Harapan,Sumber Sari,Manunggal					Terusan;Kec.Ma .Badak:Ma.Bada k Ulu,Gas Alam Badak I,Badak Baru,Saliki,Salo Palai,Tanah Datar,Batu-Batu;Kec.Tgr:Be ndang Raya;Kec.Sebul u:Sebulu Ilir,Giri Agung,Mekar Jaya,Sebulu Ulu,Sebulu Modern,Seleron g,Tj.Harapan,Su mber Sari,Manunggal Daya;Kec.Kota Bangun:Sumber Sari,Sebelimbing an,Kota Bangun II,Benua					

		Daya;Kec.Kot a Bangun:Sumb er Sari,Sebelimbi ngan,Kota Bangun II,Benua Baru,Sedulan g,Loleng,Pela, Kota Bangun III;Kec.Kenoh an:Lamin Telihan,Kahal a Ilir,Tubuhan,T eluk Bingkai,Kahal a;Kec.Kb.Jang gut:Loa Sakoh,Hamba u,Kelekat,Lon g Beleh Modang;Kec. Ma.Kaman:Te ratak,Sedulan g,Panca Jaya,Cipari Makmur,Ma.K aman Ulu,Sabintulun g;Kec.Tabang: Long Lalang,Umaq Dian,Baru,Um aq Tukung,Sidom ulyo,Ma.Tiq,M a.Salung,Ma. Kebq,Ma. Belinau,Ritan Baru,Bila Talang,Tukun g Ritan;Kec.Sa mboja:Bukit Raya,Beringin					Baru,Sedulang,L oleng,Pela,Kota Bangun III;Kec.Kenohan: Lamin Telihan,Kahala Ilir,Tubuhan,Telu k Bingkai,Kahala; Kec.Kb.Janggut: Loa Sakoh,Hambau, Kelekat,Long Beleh Modang;Kec.Ma. Kaman:Teratak, Sedulang,Panca Jaya,Cipari Makmur,Ma.Ka man Ulu,Sabintulung; Kec.Tabang:Lon g Lalang,Umaq Dian,Baru,Umaq Tukung,Sidomul yo,Ma.Tiq,Ma.Sa lung,Ma.Kebq,M a. Belinau,Ritan Baru,Bila Talang,Tukung Ritan;Kec.Samb oja:Bukit Raya,Beringin Agung,Tani Bhakti;Kec. Tgr Sbr:Manunggal Jaya,Bangun Rejo,Tj.Batu,Bhu ana Jaya,Embalut,Bu kit raya,Kertabuana ,Separi,Bukit					

		Agung,Tani Bhakti;Kec. Tgr Sbr:Manungg al Jaya,Bangun Rejo,Tj.Batu,B huana					Pariaman,Perjiw a,Tlk Dalam,Loa Lepu,Suka Maju,Loa Pari;Kec.Marang Kayu:Kersik,Pra ngat Baru,Sambera Baru,Perangat Selatan,Santan Ulu,Bunga Putih,Semangko					

		Jaya,Embalut, Bukit raya,Kertabuana,Separi,Bukit Pariaman,Perjiwa,Tlk Dalam,Loa Lepu,Suka Maju,Loa Pari;Kec.Marang Kayu:Kersik,Prangat Baru,Sambera Baru,Perangat Selatan,Santan Ulu,Bunga Putih,Semangko;Kec. Ma.Wis:Enggelam,Lebak Mantan					;Kec. Ma.Wis:Enggelam,Lebak Mantan					

51	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec. Tabang:Long Lalang,Umaq Dian,Bila Talang, Kampung Baru,Umaq Bekuay,Muara Salung Kec. Kenohan:Kahala,Teluk Bingkai,Kahala Ilir,Tubuhan Kec.Kota Bangun Darat:Sedulang,Kota Bangun III,Sumber Sari Kec. Kota Bangun: Loleng,Pela,Sebelimbingan Kec.Loa Janan:Loa Duri Seberang Kec. Loa Kulu: Jembayan Ilir Kec. Muara Badak:	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec. Tabang:Long Lalang,Umaq Dian,Bila Talang, Kampung Baru,Umaq Bekuay,Muara Salung Kec. Kenohan:Kahala,Teluk Bingkai,Kahala Ilir,Tubuhan Kec.Kota Bangun Darat:Sedulang, Kota Bangun III,Sumber Sari Kec. Kota Bangun: Loleng,Pela,Sebelimbingan Kec.Loa Janan:Loa Duri Seberang Kec. Loa Kulu: Jembayan Ilir Kec. Muara Badak: Tanjung Limau,Muara Badak Ulu	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	24 Laporan	100.000.000	-	

		Tanjung Limau,Muara Badak Ulu										
52	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	2 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	16 Dokumen	250.000.000	150.000.000	

53	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	6 Dokumen	300.000.000	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	3 Dokumen	12.258.472.960	11.958.472.960	Pembayaran: 1. Honorarium, Operasional, dan Asuransi GTPDKI = 6 Orang x 12 Bulan 2. Honorarium, Operasional, dan Asuransi Pendekar Idaman terdiri dari : TAPM = 4 Orang, PDK = 40 Orang, PLDK = 237 Orang, Staf Administrasi = 2 Orang
54	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	193 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	2 Dokumen	250.000.000	150.000.000	
55	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Semua Kecamatan	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	150 Orang	120.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Tenggarong	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	83 Orang	300.000.000	180.000.000	

56	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Tabang (semua desa)	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	19 Desa	100.000.000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Tenggarong, Kec. Tabang (semua desa)	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	19 Desa	500.000.000	400.000.000	
57	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	16 Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	6 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kec. Kembang Janggut,Anggana,Loa Kulu,Loa Janan,Kota Bangun,Tenggarong,Samboja Barat,Sebulu,Muara Badak,Muara Kaman,Marngkayu,Muara Muntai,Kota Bangun,Tenggarong Seberang,Samboja,Muara Wis,Tabang,Kenohan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	19 Laporan	382.500.000	282.500.000	
58	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Ko	1 Dokumen	100.000.000	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Ko	1 Dokumen	250.000.000	150.000.000	

	Dilaksanakan oleh Desa		ta yang Dilaksanakan oleh Desa			Dilaksanakan oleh Desa		ta yang Dilaksanakan oleh Desa				
59	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	387 Dokumen	400.000.000	300.000.000	
	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	*KAB KUTAI KARTANEGARA*	*Persentase Posyandu Aktif*	*64,07 Persen*	*1.205.000.000*	*PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT*		*Persentase Posyandu Aktif*	*64,07 Persen*	*19.346.924.500*		
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	*100 Persen*				*Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif*	*100 Persen*			

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	KAB KUTAI KARTANEGARA	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	824 Lembaga	1.205.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	824 Lembaga	19.346.924.500		
60	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kec. Tabang: Ds. Muara Belinau, Muara Tiq, Muara Salung, Muara	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat	1 Dokumen	100.000.000	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kec. Tabang: Ds. Muara Belinau, Muara Tiq, Muara Salung, Muara Kebaq, Muara Tuboq	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat	6 Dokumen	150.000.000	50.000.000	

		Kebaq, Muara Tuboq	Hukum Adat					Hukum Adat				
61	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Semua Kecamatan, Manunggal Jaya, Perangat Selatan, Beloro, Kersik, Anggana, Sidomulyo, Tubuhan, Suka Damai, Muara Aloh, Genting Tanah, Loa Lepu, Tani Bhakti, Ritan Baru, Tanah Datar, Rapak Lambur, Kedang Ipil, Beringin Agung, Hambau, Pela, Lebak Mantan, Karya Jaya,	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	39 Dokumen	150.000.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kec. Loa Janan,Kembang Janggut,Kenohan,Anggana,Loa Kulu,Muara Wis,Tenggarong,Kota Bangun, Tenggarong Seberang,Marangkayu,Muara Badak,Samboja, Sebulu,Muara Kaman,Muara Muntai,Tabang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	39 Dokumen	690.000.000	540.000.000	Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa

		Bendang Raya, Muara Muntai Ilir, Loh Sumber, Sepakat, Muara Kaman Ilir, Mekar Jaya, Bakungan, Sumber Sari, Separi, Loa Duri Ilir, Kahala, Sidomukti, Muara Wis										

62	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4422 Lembaga	125.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Samarinda	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4430 Lembaga	3.050.453.000	2.925.453.000	Pembayaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan RT sebanyak 9534 orang pengurus RT (Ketua, Sekretaris, Bendahara)

63	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Keluraha n (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluraha n dan Masyarakat Hukum Adat	Manunggal Jaya, Perangat Selatan, Beloro, Kersik, Anggana, Sidomulyo, Tubuhan, Suka Damai, Muara Aloh, Genting Tanah, Loa Lepu, Tani Bhakti, Ritan Baru, Tanah Datar, Rapak Lambur, Kedang Ipil, Beringin Agung, Hambau, Pela, Lebak Mantan, Karya Jaya, Bendang Raya, Muara Muntai Ilir, Loh Sumber, Sepakat, Muara Kaman Ilir,	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakat an Desa/Kelurah an (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurah an dan Masyarakat Hukum Adat	47 Unit	120.000.000	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakat an Desa/Kelurah an (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurah an dan Masyarakat Hukum Adat	Kec. Kembang Janggut, Muara Wis, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Muara Muntai, Sebulu, Muara Kaman, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Samboja, Samboja Barat, Muara Jawa, Muara Badak, Marangkayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakat an Desa/Kelurah an (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurah an dan Masyarakat Hukum Adat	540 Unit	11.013.111.000	10.893.111.000	1. Pembangunan Gedung Posyandu dibagi dalam 3 Zona yang terdiri dari = 12 Bangunan Di Zona Hulu (7 Kecamatan), 20 Di Zona Tengah, (6 Kecamatan), 15 Zona Pesisir (7 Kecamatan 2. Pengadaan Kursi 47 x 5 Unit = 235 unit Pengadaan Meja 47 x 5 = 235 Unit Lemari Geser 47 x 1 = 47 Unit

		Mekar Jaya, Bakungan, Sumber Sari, Separi, Loa Duri Ilir,										
		Kahala, Sidomukti, Muara Wis										

64	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kec. Muara Badak : Suka Damai,Badak Mekar, Ds. Tanjung Limau Kec. Sebulu : Senoni, Tanjung Harapan Kec. Muara Kaman : Liang Buaya,Rantau Hempang, Ds. Tunjungan,Lebaho Ulaq Kec. Kota Bangun Darat: Kota Bangun I,Kota Bangun II,Wonosari, Sangkuliman Kec. Muara Muntai: Jantur Selatan,Batuq ,Rebaq Rinding Kec. Loa Janan:	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	170.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Sebulu Modern,Badak Mekar,Lebaho Ulaq,Jantur Selatan,Beringin Agung,Loa Duri Ilir,Sangkuliman, Manunggal Jaya,Sidomulyo, Kota Bangun I.Kembang Janggut, Santan Ulu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	51 Dokumen	650.000.000	480.000.000	

		Loa Janan Ilir										
65	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten, Provinsi, Nasional, Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4 Laporan	120.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong ,Prov. Kalimantan Timur, Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	643.360.500	523.360.500	
66	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten, Provinsi, Semua Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	3 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	4 Laporan	300.000.000	200.000.000	

			Masyarakat					Masyarakat				
67	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	75.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	200.000.000	125.000.000	
68	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5 Dokumen	245.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	53 Dokumen	2.650.000.000	2.405.000.000	Fasilitasi Kegiatan Seketariat, Pokja I, Pokja II, Pokja III dan Pokja IV TP. PKK Kabupaten
TOTAL					28.554.616.661					65.329.407.818	36.774.791.157	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1 Kegiatan ini kami peroleh ketika pelaksanaan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan yang memang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Dari beberapa usulan yang disampaikan oleh masyarakat dalam forum musrenbang melalui perwakilannya, seperti Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa, Lembaga Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, maupun Tokoh Pemuda. Dalam prosesnya, forum musrenbang menampung seluruh aspirasi yang masuk untuk ditelaah kembali dan diklasifikasi tentang kebutuhan prioritas dan leading sektor yang mengkoordinir aspirasi tersebut.

2.5.2 Hasil klasifikasi dan telaah kebutuhan program prioritas yang sesuai dengan rencana pencapaian target program pemerintah daerah melalui RPJMD. Sehingga terdapat sinergisitas antara kebutuhan masyarakat dan kepentingan pemangku jabatan sebagaiman tujuan dan arah pembangunan yang berdasarkan pada RPJMN, RPJMD Porvinsi, RPJMD Kabupaten serta Renstra OPD terkait.

2.5.3 Usulan Masyarakat yang telah diverifikasi melalui SIPD RI yang disesuaikan dengan pembidangan urusan dan target Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah berjumlah 102 dengan Kamus Usulan Usulan Fasilitasi Sarana Prasarana Desa ada 25 Usulan dan Fasilitasi Pembangunan Gedung Posyandu sebanyak 77 Usulan yaitu dengan rincian yang statusnya diproses sebanyak 3 Usulan, di kembalikan 47 Usulan dan yang tolak 52 Usulan, adapun rincian dan penjelesan terkait masing-masing usulan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Jl. Tenis Lapangan RT.13 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	35 Pcs	Permasalahan dan Kamus Usulan Tidak sesuai
2	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Jl. Tenis Lapangan RT.13 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	35 Pcs	Permasalahan dan Kamus Usulan Tidak sesuai

3	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Jl. Tenis Lapangan RT.13 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa		Permasalahan dan Kamus Usulan Tidak sesuai
4	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Jl. Tenis Lapangan RT.13 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa		Permasalahan dan Kamus Usulan Tidak sesuai
5	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Jl. Tenis Lapangan RT.13 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	5 Unit	Permasalahan dan Kamus Usulan Tidak sesuai
6	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Jl. Tenis Lapangan RT.13 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa		Permasalahan dan Kamus Usulan Tidak sesuai

7	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Jl. Tenis Lapangan RT.13 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa		Permasalahan dan Kamus Usulan Tidak sesuai
8	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	RT.12 Desa Giri Agung, Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Giri Agung	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Proposal, Dokumen Status lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun
9	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Jalan Karya RT 02 Kel, Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa		Usulan tidak spesifik, Untuk Fasilitas Meja dan Kursi Rapat terfasilitasi Pada Tahun Anggaran 2024

10	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Desa Long Beleh Haloq, Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Long Beleh Haloq	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Proposal, Dokumen Status lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun
11	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Bukit Samboja indah RT 07 Kel.Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Usulan Belum menjadi Program Prioritas DPMD Tahun 2025

12	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Galendrong Dook RT 24 Kel Muara Jawa Ulu 0°49'27.73"S 117°12'41.29"E, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	1 Unit	Lengkapi Proposal, Dokumen Status lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun
13	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jalan Ahmad sifa Rt 13 Kelurahan Dondang Kecamatan muara Jawa lat. 0.772657° - long 117.228629° P1 KELURAHAN , Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Proposal, Dokumen Status lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun

14	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jalan Ahmad sifa Rt 13 Kelurahan Dondang Kecamatana Muara Jawa lat. 0.772657° - long 117.228629° PI KELURAHAN , Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Proposal, Dokumen Status lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun
15	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jalan Ahmad sifa RT.13 Kelurahah Dondang lat. 0.772657° - long 117.228629° P.3 CSR PT Pertamina Hulu Sanga-sanga (PHSS) , Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Proposal, Dokumen Status lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun

16	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jalan Ahmad Sifa RT. 13 kelurahan Dondang lat. 0.772657° - long 117.228629° P.3 CSR PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) , Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Usulan Belum menjadi Program Priotas DPMD Tahun 2025

17	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	RT.10, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Usulan Bukan Menjadi Tusi DPMD
18	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	RT.10, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Proposal, Dokumen Status lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun

19	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu Bunga Tanjung) RT 011, Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Beloro	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Proposal, Dokumen Status lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun
20	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Teratai Putih, Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Beloro	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Proposal, Dokumen Status lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun

21	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Pembangunan Gedung Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Teratai Putih RT 005, Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Beloro	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Proposal, Dokumen Status lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun
22	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	RT 03 Sungai Seluang, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Proposal, Dokumen Status lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun

23	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	jl Karya jaya RT 04 kel.Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Lengkapi Proposal, Dokumen Status lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun

24	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	jl Karya jaya posyandu AB 1 RT 04 kel.wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Usulan Belum menjadi Program Prioritas DPMD Tahun 2025
25	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	RT 03 Sungai Seluang, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Proposal, Dokumen Status lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun

26	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Posyandu AB 2 dan AB 3 kel Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Lengkapi Proposal, Dokumen Status lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun

27	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Posyandu AB 2 dan AB 3 kel. Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Usulan Bukan Menjadi Tusi DPMD

28	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Posyandu AB 2 dan AB 3 kel.Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Usulan Bukan Menjadi Tusi DPMD
29	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Posyandu AB 2 dan AB 3,Usila kel.Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Usulan Bukan Menjadi Tusi DPMD

30	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	RT 001 , Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Usulan Lanjutan Pembangunan Harus dikoordinasikan dulu dgn Pihak terkait Perihal Pembangunan Awal
31	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	RT.10 , Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Proposal, Dokumen Status lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun

32	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	RT.01 , Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Usulan Lanjutan Pembangunan Harus dikoordinasikan dulu dgn Pihak terkait Perihal Pembangunan Awal
33	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	jl pramuka rt 03, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argosari	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Usulan dan Permasalahan tidak sinkron

34	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	jl pramuka rt 03, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argosari	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	18 Unit	Usulan Belum menjadi Program Priotas DPMD Tahun 2025

35	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	jl pramuka rt 3, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argosari	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Usulan Belum menjadi Program Prioritas DPMD Tahun 2025
36	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	jl pramuka rt 03, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argosari	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	9 Unit	Usulan Belum menjadi Program Prioritas DPMD Tahun 2025

37	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	jl pramuka rt 03, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argosari	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Usulan Lanjutan Pembangunan Harus dikoordinasikan dulu dgn Pihak terkait Perihal Pembangunan Awal
38	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Kantor lurah wonotirto jl karya RT 03 kel.Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	1 Unit	Fasilitasi Kantor Lurah Bukan menjadi Tusi DPMD

39	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Kantor Lurah Wonotirto Jl Karya Rt 03 Kel. Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	1 Unit	Fasilitasi Kantor Lurah Bukan menjadi Tusi DPMD
40	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Kantor kelurahan Wonotirto Jl karya Rt 04 kel. Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	1 Unit	Usulan sudah di Fasilitasi pada Tahun Anggaran 2024
41	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Kantor kelurahan wonotirto Jl karya Rt 03 kel.wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	1 Unit	Usulan sudah di Fasilitasi pada Tahun Anggaran 2024

42	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Desa Muai RT 09, Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Muai	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Usulan Menjadi Prioritas DPMD Tahun 2025
43	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jl. Bpp-Handil II RT 06 Teluk Pemedas, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Usulan Belum menjadi Program Prioritas DPMD Tahun 2025

44	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jl. Bpp-handil II Perum pemedas RT 08 Teluk Pemedas, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Usulan Lanjutan Pembangunan Harus dikoordinasikan dulu dgn Pihak terkait Perihal Pembangunan Awal
45	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu, Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Sambera Baru	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa		Sudah terfasilitasi Tahun Anggaran 2024
46	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Jalan Karya RT 02 Kel, Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa		Usulan Tidak dilengkapi dengan Proposal, Dokumentasi dll

47	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Dusun Utara RT.001 Desa Tanah Datar, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Tanah Datar	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Usulan Tidak dilengkapi dengan Dokumen Status Lahan
48	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Dusun Kuyung, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Sebemban	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Usulan tidak di lengkapi, Proposal, Dokumen Status Lahan, Lokasi, dan Dokumentasi

49	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Bukit samboja indah RT 07 Kel.Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Usulan tidak di lengkapi, Proposal dan Lokasi
50	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	RT 004 Desa Kota Bangun III, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Kota Bangun III	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Usulan tidak di lengkapi, Proposal, Dokumen Status Lahan, Lokasi, dan Dokumentasi

51	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jalan Ahmad sifa Rt 13 Kelurahan Dondang Kecamatan muara Jawa lat. 0.772657° - long 117.228629° P1 KELURAHAN , Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Proposal yang disampaikan Tahun 2022, Lengkapi Dokumen Status Lahan
52	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jalan Ahmad sifa Rt 13 Kelurahan Dondang Kecamatana Muara Jawa lat. 0.772657° - long 117.228629° PI KELURAHAN , Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Proposal yang disampaikan Tahun 2022, Lengkapi Dokumen Status Lahan

53	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jalan Ahmad sifa RT.13 Kelurahah Dondang lat. 0.772657° - long 117.228629° P.3 CSR PT Pertamina Hulu Sanga-sanga (PHSS) , Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Proposal yang disampaikan belum bertanda tangan, dan Lengkapi Dokumentasi
54	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Jl.Habib Tunggang Parangan RT. 003 Selingsing, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jembayan Tengah	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	1 Unit	Usulan Pembangunan Gedung Sekolah bukan menjadi Tusinya DPMD

55	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	jl Karya jaya RT 04 kel.Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Bukan menjadi Program Prioritas Tahun 2025 DPMD
56	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	jl Karya jaya posyandu AB 1 RT 04 kel.wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Bukan menjadi Program Prioritas Tahun 2025 DPMD dan tidak dilengkapi dengan Proposal, Dokumen dll

57	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Posyandu AB 2 dan AB 3 kel Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Bukan menjadi Program Prioritas Tahun 2025 DPMD dan tidak dilengkapi dengan Proposal, Dokumen dll

58	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Posyandu AB 2 dan AB 3 kel.Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	
59	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	RT 17 (0°52'39"S 117°12'36"E), Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Usulan belum dilengkapi dengan Proposal, Dokumen Status Lahan dan Lokasi

60	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Gedung Posyandu Balita (Posyandu bahagia 1 s.d. 6), Posbindu, dan Posyandu Lansia Desa Kota Bangun II, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Kota Bangun II	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Usulan tidak di lengkapi, Proposal, Dokumen Status Lahan, Lokasi, dan Dokumentasi
61	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	RT 20 (0°52'12"S 117°12'40"E), Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Usulan belum dilengkapi dengan Proposal, Dokumen Status Lahan dan Lokasi

62	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	RT 19 (0°52'19"S 117°13'35"E), Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Usulan belum dilengkapi dengan Proposal, Dokumen Status Lahan dan Lokasi
63	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Kantor kelurahan wonotirto Jl karya Rt 03 kel.wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Fasilitasi Sarana Kantor Lurah tidak ada cantolah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada DPMD

64	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Desa Long Beleh Haloq, Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Long Beleh Haloq	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Proposal yang telah bertanda tangan, Dokumen Status Lahan, Dokumentasi Lokasi, dan Titik Koordinat Lokasi
65	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jalan pemuda RT 007 Desa Sebulu ilir Kecamatan Sebulu , Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Dokumen Status Lahan

66	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jl Habib Tunggang Parangan Desa Jembayan Tengah, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jembayan Tengah	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Proposal yang disampaikan Tahun 2023, Lengkapi Dokumen Status Lahan
67	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jl.Habib Tunggang Parangan Desa Jembayan Tengah, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jembayan Tengah	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Usulan sama atau terdoble

68	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jl. Bpp-Handil II RT 06 Teluk Pemedas, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Permasalahan dan Usulan Perlu disinkronkan
69	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	rt 03, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Bukan Menjadi Prioritas Program Tahun 2025 DPMD

70	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Desa Kelekat RT.004, Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kelekat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Bukan Menjadi Prioritas Program Tahun 2025 DPMD

71	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Posyandu Cempaka, Dusun Sidomakmur, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Buana Jaya	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Dokumen Status Lahan, Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun
72	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	JL. KENANGA RT.04, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Loa Lepu	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Dokumen Status Lahan

73	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jalan Kampung Lama RT.12, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Jantur	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Perbaharui Usulan Proposal, Lengkapi Dokumen Status Lahan
74	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jalan Kampung Lama RT.008, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Jantur	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Perbaharui Usulan Proposal, Lengkapi Dokumen Status Lahan

75	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jl. Ulin, Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ulu	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Perbaharui Usulan Proposal, Lengkapi Dokumen Status Lahan
76	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Loa Tebu RT .12, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Tebu	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Usulan Belum dilengkapi dengan Proposal yang berisikan Usulan Pembangunan, Dokumen Status Lahan, dan Dokumentasi

77	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Kelurahan Jahab RT 16, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Jahab	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Usulan Belum di lengkapi Proposall, Dokumen Status Lahan dan Dokumentasi dll
78	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Loa Tebu RT . 18, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Tebu	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Permasalahan dan Usulan tidak sinkron

79	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Loa Tebu RT. 20, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Tebu	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Bukan Menjadi Program Prioritas DPMD Tahun 2025
80	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	DUSUN AJJALANG RT 011 DESA SANTAN ILIR, Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Santan Ilir	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Permasalahan dan Usulan tidak sesuai, Lengkapi Dokumen Status Lahan

81	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	DUSUN MATTIEO WALI RT 004 DESA SANTAN ILIR, Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Santan Ilir	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Permasalahan dan Usulan tidak sesuai, Lengkapi Dokumen Status Lahan
82	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Desa Tabang Lama, Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Tabang Lama	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Proposal dan Dokumentasi

83	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Desa Muara Pedohon, Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Pedohon	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Usulan Tidak dilengkapi Proposal, Dokumen Status Lahan dan Dokumentasi Lokasi
84	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa Pulau Pinang, Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Pulau Pinang	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa		Usulan yang disampaikan di Proposal tidak Spesifik

85	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Dusun sari mulya B , Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Purwajaya	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Dokumen Status Lahan, Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun
86	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Dusun ajjalang, Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Santan Ilir	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Dokumen Status Lahan, Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun

87	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Dusun mattiro wali rt 004, Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Santan Ilir	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Dokumen Status Lahan
88	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Desa Pulau Pinang, RT.07, Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Pulau Pinang	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Bukan Menjadi Prioritas Program Tahun 2025 DPMD

89	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Desa Pulau Pinang, RT.07, Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Pulau Pinang	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif		Bukan Menjadi Prioritas Program Tahun 2025 DPMD
90	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Kantor Desa Semangko Jl. Syamsuddin. HA RT. 001, Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semangko	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa		Usulan sudah di Fasilitasi pada Tahun Anggaran 2024

91	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Desa Long Beleh Haloq, Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Long Beleh Haloq	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Dokumen Status Lahan
92	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Desa Loa Duri Ilir RT.5, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Dokumen Status lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun

93	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Kantor Desa Muara Muntai Ilir, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ilir	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa		Usulan sudah diFasilitasi pada Tahun Anggaran 2024
94	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa loa duri ilir Dusun putak, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa		Permasalahan dan Usulan tidak sesuai, Belum menjadi Program Prioritas DPMD Tahun 2025
95	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Desa Pulau Pinang, RT.07, Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Pulau Pinang	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Dokumen Status Lahan Tanah

96	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa Muara Leka, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Leka	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa		Usulan sudah diFasilitasi pada Tahun Anggaran 2024
97	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa Pulau Pinang, RT.07, Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Pulau Pinang	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	1 Unit	Usulan sudah diFasilitasi pada Tahun Anggaran 2024
98	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa Pulau Pinang, RT.07, Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Pulau Pinang	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	1 Unit	Usulan Belum menjadi Program Prioritas DPMD Tahun 2025

99	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	JL.RAYA SUNGAI JANTUR RT.003 DESA JANTUR SELATAN KECAMATAN MUARA MUNTAI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Jantur Selatan	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa		Usulan sudah diFasilitasi pada Tahun Anggaran 2024
100	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Desa Lamin Pulut RT, 001, Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Lamin Pulut	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Usulan Belum menjadi Program Prioritas DPMD Tahun 2025

101	PENATAAN DESA/ Penyelenggaraan Penataan Desa	Loa sakoh RT.003 JLn.pusban, Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Loa Sakoh	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa/Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	1 Unit	Usulan Belum menjadi Program Prioritas DPMD Tahun 2025
102	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Dusun Handil Tiga RT.03, Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Santan Tengah	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif/ Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	1 Unit	Lengkapi Usulan dengan Dokumen Status Lahan dan Dokumentasi Lokasi yang akan dibangun

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2021-2026 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP tadi, RPJMN 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (*Nawa Cita*) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005–2025.

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Agenda satu tahun pertama dalam Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026, juga dimaksudkan sebagai upaya membangun fondasi untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, disamping melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak. Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat, pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat

dilaksanakan dengan lancar. Sementara, agenda lima tahun selama tahun 2021-2026 sendiri diharapkan juga akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi tahap- tahap pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR, dengan penjelasan sebagai berikut:

Mandiri	:	berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
Maju	:	berarti tingkat kemakmuran yang tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
Adil	:	berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah.
Makmur	:	berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) misi yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembang-kan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan membangun sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju; mereformasi bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekono- mian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan membenahi struktur hukum, meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu dengan membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melampui kekuatan esensial minimum dan disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan

   mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang

sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk
   mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia dalam pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

   Berdasarkan RPJPN dan RPJM yang telah dirumuskan bahwa salah satu yang menjadi kebijakan penting berdasarkan RPJMD

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yaitu Penangan Stunting dimana masalah stunting merupakan Isu Nasional dimana Daerah harus menyusun perencanaan dan arah kebijakan pada Perangkat Daerah, dimana Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa adalah merupakan Perangkat Daerah yang
diamanahi untuk menyusun Program Kegiatan yang mengarah pada Penurunan Angka Stunting.

RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan, yaitu :

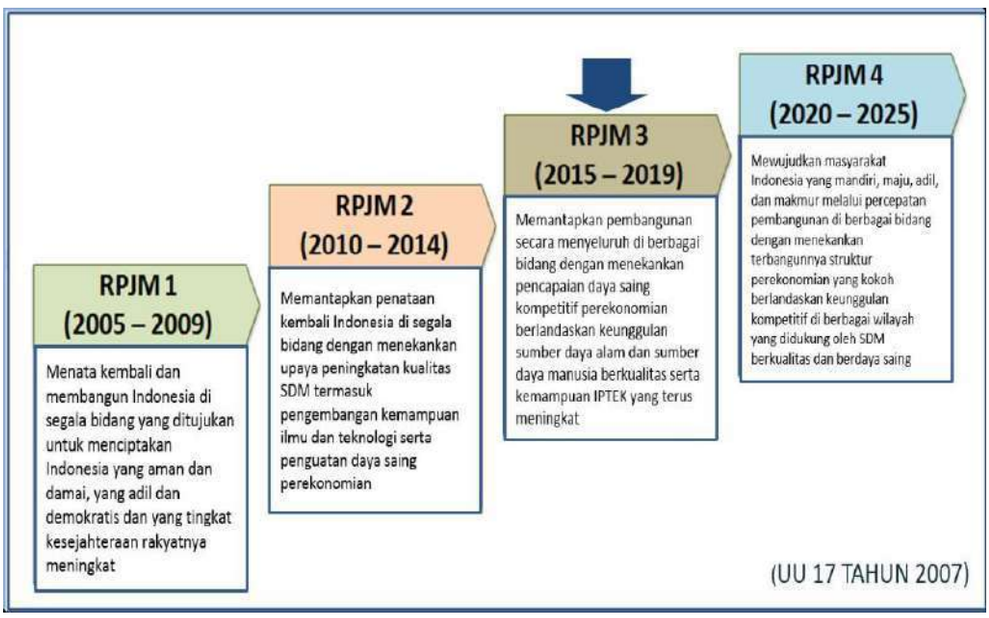

Berdasarkan telaahan Kebijakan Nasional melalui RPJMN dapat disinergikan dengan RPJMD, RENSTRA OPD serta Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah. Pada saat ini kita telah memasuki tahapan RPJMN 3 dari RPJPN, sehingga sangat diperlukan sinergisitas prioritas dan arah pembangunan pemerintah pusat dan daerah agar tujuan pembangunan Republik Indonesia yang telah dirancang secara sistematis melalui RPJPN maupun RPJMN dapat terlaksana secara maksimal.

TABEL 3.1

HUBUNGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Nomor	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah
1	Ekonomi	1. Pengarusutamaan Gender 2. Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang 3. Peningkatan investasi sektor UMKM 4. Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparasi harga 5. Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global 6. Pengembangan pusat - pusat pertumbuhan ekonomi baru 7. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir) 8. Peningkatan ekspor produk olahan 9. Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan 10. Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian 11. Penyediaan tenaga kerja petani melalui program transmigrasi 12. Peningkatan infrastruktur pertanian 13. Peningkatan produktivitas pertanian 14. Perbaikan tata niaga produk pangan 15. Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan 16. Peningkatan rasio elektrifikasi 17. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi 18. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur dan transportasi di kawasan maloy, kawasan industry lainnya dan pusat pertumbuhan. 19. Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan
2	Lingkungan	1. Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan 2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan luas tutupan lahan. 3. Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi (green economy) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan 4. Pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi 5. Meningkatkan kualitas udara, perairan, dan lingkungan hidup perkotaan 6. Penegakan hukum lingkungan 7. Penurunan emisi gas rumah kaca 8. Pengarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah
3	Politik	-
4	Hukum	-
5	Pertahanan dan Keamanan	-
6	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	1. Standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas fokus 2. Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur
7	Kesejahteraan Rakyat	1. Peningkatan Relevansi dan mutu pendidikan 2. Peningkatan kesempatan belajar anak 3. Peningkatan mutu di bidang kesehatan

		4. Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja Penyediaan infrastruktur dasar bagi
8	Kelautan	-

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Adapun tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang didasarkan atas rumusan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra-PD adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Daya Saing Desa	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan, kewenangan, penamaan, kode desa, dan sarana prasarana desa
			2. Peningkatan kerjasama antar desa dan Kawasan Pedesaan berdasarkan potensi yang dimiliki	1. Meningkatkan Kerjasama Desa berbasis Kawasan Pertanian dalam arti luas
				2. Mengidentifikasi kawasan perdesaan berbasis potensi komoditas unggulan desa
			3. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Meningkatkan kapasitas penyelenggara Pemerintahan Desa
				2. Memperkuat kapasitas fiskal desa dengan mengoptimalkan spesific grant (bantuan keuangan khusus) kepada desa
				3. Membentuk gugus tugas pendamping desa dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan/tehnis
				4. Mendorong BUMDesa untuk mengembangkan unit usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat (Pertanian, air bersih, dan listrik desa dll)
			4. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui peran lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan desa/Kelurahan	1. Revitalisasi peran Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
				2. Optimalisasi Peran RT melalui pengalokasian 50 juta rupiah per RT
				3. Mendorong Ekonomi Masyarakat dengan menggali potensi dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

				4. Mengembangkan semangat Gotong Royong dan Tetap Menjaga Ketertiban, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

Sasaran atau *objectives* organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sedangkan sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

TABEL 3.2

SASARAN YANG DITEMPUH UNTUK MENCAPAI TUJUAN

NO	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Prosentase tingkat perkembangan lembaga kemasyarakatan
			Prosentase tingkat penyelenggaraan pemerintahan desa
		Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Prosentase status desa berkembang menjadi desa maju di Kukar

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN

Rencana kerja Program dan kegiatan serta pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025 dapat disampaikan dengan analisis kebutuhan dan pertimbangan kebijkana sebagai berikut :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan terhadap rumusan program dan kegiatan Tahun 2025 adalah bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menterjemahkan dan mengimplementasik Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dengan beberapa pertimbangan rumusan antara lain : pencapaian target kinerja perangkat yaitu IKU (Indikator Kinerja Utama), IKK (Indikator Kinerja Kunci), Indikator Program dan Kegiatan, yang tentunya mengarah kepada Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 yaitu : Pemantapan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Akselerasi dan Transpormasin Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

b. Adapun program kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 5 Program yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 8 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan , Program Penataan Desa terdiri dari 1 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan, Program Kerjasama Desa terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, Program Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari 1 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan serta Program Pemberdayaan Lembaga Kemsyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat terdiri dari 1 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan. Dimana jumlah keseluruhan Program Kegiatan pada Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa Pada Tahun Anggaran 2025 yaitu 5 Program, 12 Kegiatan dan 59 Sub Kegiatan.

c. Rumusan Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan pada Rancangan Awal Renja Tahun 2025 sesuai dengan yang termuat pada Renstra 2021-2026 DPMD baik itu terkait dengan rumusan indikator, target serta pagu indikatif sudah sesuai berdasarkan rumusan yang ada pada Renstra.

d. Adapun Rumusan terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	13				URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA								65.329.407.818					25.314.210.893
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA								19.405.789.448			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	85 Nilai	17.673.125.065

									Pemerintahan (AKIP)		
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000.000			Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	849.894.400

2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	Nilai Akuntab ilitas Kinerja Instansi Pemerin tahan	Tenggarong, Samarinda	84 Nilai	5 Dokumen	100 Persen	450.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokume n	449.894.400
2	13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen RKA-SKPD	Nilai Akuntab ilitas Kinerja Instansi Pemerin tahan	Tenggarong	84 Nilai	2 Dokumen	100 Persen	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
2	13	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Nilai Akuntab ilitas Kinerja Instansi Pemeri	Tenggarong	84 Nilai	2 Dokumen	100 Persen	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		

							Koordinasi Penyusun an Dokumen DPA-SKPD	n tahan								Dokumen DPA- SKPD		
2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Akuntab ilitas Kinerja Instansi Pemerin tahan	Tenggarong	84 Nilai	3 Laporan	100 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		

2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntab ilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	1 Laporan	100 Persen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	400.000.000
2	13	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Nilai Akuntab ilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	1 Dokumen	100 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				
2	13	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiks	Nilai Akuntab ilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	1 Data	100 Persen	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				

							a Lingkup Perangkat Daerah											
2	13	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasark an Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusun an Dokume n Perencan a an Perangka t Daerah	Nilai Akunta b ilitas Kinerja Instans i Pemeri n tahan	Tenggarong	84 Nilai	1 Berita Acara	100 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				

2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.105.338.976			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	12 Laporan	14.390.280.193

2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Akuntab ilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	2142 Orang/Bulan	12 Laporan	13.855.338.976	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2782 Orang/Bulan	13.990.280.193
2	13	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Akuntab ilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	1 Laporan	12 Laporan	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	Nilai Akuntab ilitas Kinerja	Tenggarong	84 Nilai	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triw	12 Laporan	400.000.000

					Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Instansi Pemerintahan						Bagi Hasil		ulan an/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD		
2	13	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	1 Dokumen	12 Laporan	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				

							Anggaran											
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								105.000.000			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	1 Laporan	48.000.000

2	13	01	2.03	0006	Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penataus a haan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai Akuntab ilitas Kinerja Instansi Pemerin tahan	Tenggarong	84 Nilai	1 Laporan	1 Laporan	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	48.000.000
2	13	01	2.03	0001	Penyusuna n Perencanaa n Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuh an Barang Milik Daerah SKPD	Nilai Akuntab ilitas Kinerja Instansi Pemerin tahan	Tenggarong	84 Nilai	1 Laporan	1 Dokume n	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				
2	13	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordina si Penilaian Barang	Nilai Akuntab ilitas Kinerja Instansi Pemerin tahan	Tenggarong	84 Nilai	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				

							Milik Daerah SKPD											
2	13	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsilia si dan Penyusun an Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai Akuntab ilitas Kinerja Instansi Pemerin tahan	Tenggarong	84 Nilai	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								318.000.000			Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20 Persen	250.000.000
2	13	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapa	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Nilai Akuntab ilitas Kinerja Instansi	Tenggarong	84 Nilai	112 Paket	20 Persen	168.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0

					nn ya		Kelengkap an	Pemerin tahan										

2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Jakarta Yogyakarta Malang	84 Nilai	60 Orang	20 Persen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	250.000.000
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								574.000.000			Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	17 Persen	631.500.000
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Tenggarong	84 Nilai	1 Paket	23 Persen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	250.000.000

2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediak a n	Nilai Akunta b ilitas Kinerja Instans i Pemeri n tahan	Tenggarong	84 Nilai	1 Paket	23 Persen	24.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	24.000.00 0
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokume n Bahan Bacaan dan Peratura n Perunda n g-Undanga n yang Disediak a n	Nilai Akunta b ilitas Kinerja Instans i Pemeri n tahan	Tenggarong	84 Nilai	3 Dokumen	23 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokum e n	50.000.00 0
2	13	01	2.06	0009	Penyelengga r aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelen g garaan Rapat Koordina si dan Konsulta si SKPD	Nilai Akunta b ilitas Kinerja Instans i Pemeri n tahan	Tenggarong	84 Nilai	14 Laporan	23 Persen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.00 0

2	13	01	2.06	0010	Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penataus a haan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai Akunta b ilitas Kinerja Instans i Pemeri n tahan	Tenggarong	84 Nilai	200 Dokumen	23 Persen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	186 Dokum e n	0
2	13	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaa n Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokume n Dukunga n Pelaksan a an Sistem Pemerint a han Berbasis Elektroni k pada SKPD	Nilai Akunta b ilitas Kinerja Instans i Pemeri n tahan	Tenggarong	84 Nilai	4 Dokumen	23 Persen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50 Dokum e n	157.500.000
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								2.050.000.00 0			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	150.000.000

2	13	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tenggarong	84 Nilai	6 Unit	100 Persen	2.000.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tenggarong	84 Nilai	5 Unit	100 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	150.000.000
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.053.450.472			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17 Persen	1.203.450.472

2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyedia n Jasa Komunik a si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediak a n	Nilai Akunta b ilitas Kinerja Instans i Pemeri n tahan	Tenggarong	84 Nilai	1 Laporan	23 Persen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	200.000.000
2	13	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyedia n Jasa Peralata n dan Perlengk a pan Kantor yang Disediak a n	Nilai Akunta b ilitas Kinerja Instans i Pemeri n tahan	Tenggarong	84 Nilai	1 Laporan	23 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	100.000.000
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyedia n Jasa Pelayana n Umum	Nilai Akunta b ilitas Kinerja Instans i	Tenggarong	84 Nilai	12 Laporan	23 Persen	903.450.472	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	903.450.472

							Kantor yang Disediaka n	Pemerin tahan								yang Disediakan		
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								200.000.000			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17 Persen	150.000.000
2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraa n Perorang a n Dinas atau Kendara a n Dinas Jabatan yang Dipelihar a dan dibayark a n Pajaknya	Nilai Akunta b ilitas Kinerja Instans i Pemeri n tahan	Tenggarong	84 Nilai	6 Unit	23 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	100.000.000

2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tenggarong	84 Nilai	25 Unit	23 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	0
2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tenggarong	84 Nilai	65 Unit	23 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	50.000.000
2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeri	Tenggarong	84 Nilai	1 Unit	23 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				

							yang Dipelihara/ Direhabilitasi	n tahan									
2	13	01	2.09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tenggarong	82 Nilai	1 Unit	82 Nilai	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA								1.850.000.000			Prosentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	38,86 Persen	370.000.000
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa								1.850.000.000			Jumlah Desa yang difasilitasi dalam	28 Desa	370.000.000

									penyelenggaraa n penataan desa		

2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Tanjung Limau, Bukit Pariaman, Jantur, Jantur Selatan, Batuah, Jonggon Desa, Sebuntal	25,91 Persen	7 Desa	27 Desa	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Fasilitasi Pembentukan Desa	1 Desa	120.000.000

2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitas i Penataan Wilayahn y a	Prosentase Status Desa Berkem bang Menjadi Desa Maju di Kukar	Sidomulyo(A nggana),Semayang(Ken ohan),Loleng (Kota Bangun),Su mber Sari(Kota Bangun Darat),Salo Palai(Muara Badak),Pera ngat Baru(Marang kayu),Gunun g Sari(Tabang) ,Lebaho Ulaq(Muara Kaman),Sele rong(Sebulu) ,Bukit Pariaman(Tg r	25,91 Persen	13 Desa	27 Desa	1.300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	2 Desa	0

									Seberang), M uara Leka(Muara Muntai),Leba k Mantan(Muar a Wis), Sepakat(Loa Kulu)									
2	13	02	2.01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitas i Penataan Kewenang annya	Prosentase Status Desa Berkem bang Menjadi Desa Maju di Kukar	Karyajaya, Kutai Lama,Bakungan,Kedang Ipil,Rebaq Rinding,Sungai Bawang,Semangko,Muara Pedohon,L	25,91 Persen	18 Desa	27 Desa	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	10 Desa	100.000.000

									a min Pulut,Hamba u,Bunga Jadi,Lekaq									

									Kidau,Bhuan a Jaya,Sebeli mbingan,Lun g Anai,Lebaq Cilong,Rapa k Lambur,Batu ah									
2	13	02	2.01	0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitas i Penamaan dan Kode Desa	Prosentase Status Desa Berkem bang Menjadi Desa Maju di Kukar	Kota Bangun I, Kota Bangun II, Kota Bangun III, Salo Cella, Jonggon Desa	25,91 Persen	5 Desa	27 Desa	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	6 Desa	50.000.000
2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Prosentase Status Desa Berkem bang Menjadi Desa Maju	Genting Tanah Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	25,91 Persen	7 Unit	27 Desa	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	2 Unit	100.000.000

								di Kukar										
2	13	03			PROGRAM PENINGKATA N KERJASAMA DESA								500.000.000			Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	100 Persen	650.000.000
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa								500.000.000			Jumlah Kerjasama Desa yang difasilitasi	58 Desa	650.000.000

2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kot a	Persentase Realisasi Kesepakat an Kerjasama Desa	Jumlah Dokume n Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupat en /Kota	Prosent ase Status Desa Berke m bang Menjad i Desa Maju di Kukar	Kec. Muara Badak: Saliki.Salo Palai,Muar a Badak Ulu,Muara Badak Ilir,Tanjun g Limau,Tan ah Datar,Bad ak Baru,Suka Damai,Gas Alam Badak I,Batu-Batu,Bada k Mekar,Salo Cella,Sung ai Bawang, Kec. Marangkay u: Perangat Baru,Bung a Putih,Sem	100 Persen	7 Dokumen	57 Desa	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Ko ta	9 Dokum e n	250.000.00 0

									angko,Prangat Baru,Prangat Selatan, Kersik,Santa n Ulu,Santan Tengah,Sant an Ilir,Makarti,Sebuntal, Kec. Samboja:Kar ya Jaya,Bukit Raya,Beringin Agung									

2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kot a	Persentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten /Kota	Prosentase Status Desa Berkem bang Menjadi Desa Maju di Kukar	Kec. Loa Janan : Bakungan, Loa Duri Ulu, Loa Janan Ulu, Purwajaya, Tani Bakti, Batuah, Loa Duri Ilir, Tani Harapan Kec. Loa Kulu : Jonggon, Sungai Payang, Jembayan, Loa Kulu Kota, Loh Sumber, Ponoragan , Rempanga, Margahayu,	100 Persen	4 Dokumen	57 Desa	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	3 Dokume n	150.000.000

									Jonggon Jaya, Long Anai, Jembayan Tengah, Jembayan Dalam, Sepakat, Sumber Sari, Jongkang. Kec. Anggana : Sepatin, Muara Pantuan, Tani Baru, Kutai Lama, Anggana, Sungai Meriam, Sidomulyo, Handil Terusa Kec. Kenohan : Lamin Telihan, Lamin Pulut,									

									Teluk Bingkai, Kahala, Tubuhan, Semayang, Teluk Muda, Tuana Tuha, Kahala Ilir.									
2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangu nan Kawasan Perdesaan	Prosentase Status Desa Berkem bang Menjadi Desa Maju di Kukar	Kec. Tgr Seberang: Separi,Kerta Buana,Bukit Pariaman, Bu ana Jaya, Suka Maju, Kec. Loa Kulu:Desa	100 Persen	7 Dokumen	57 Desa	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	6 Dokume n	250.000.000

									Loh Sumber,Jem bayan Tengah,Sum ber Sari,Ponorag an,Sepakat, Rempanga, Kec. Sebulu: Manunggal Daya,Mekar Jaya,Sumber Sari,Kec. Muara									

									Kaman:Panc a Jaya,Sido Mukti,Cipari Makmur,Bun ga Jadi,Kec. Tgr Seberang: Embalut,Ban gun Rejo,Manung gal Jaya,Karang Tunggal,Buki t RayaTanjung Batu,Loa Lepu,Kec. Marangkayu: Prangat Baru,Prangat Selatan,Mak arti,Bunga Putih,Sambe ra Baru									

2	13	04			PROGRAM ADMINISTRA SI PEMERINTAH AN DESA								24.226.693.870			Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	95 Persen 10 Persen	4.456.085.828
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggar aan Administrasi Pemerintahan Desa								24.226.693.870			Jumlah Desa yang dibina dan diawasi	3025 Desa	4.456.085.828
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggar aan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintaha n Dalam Kategori Baik Pertumbuha n Pendapatan BUMDesa	Jumlah Dokumen Penyeleng garaan Administra si Pemerinta han Desa	Prosentase Status Desa Berkem bang Menjadi Desa Maju di Kukar	Tanjung Limau, Bukit Pariaman, Jantur, Jantur Selatan, Batuah, Jonggon Desa, Sebuntal	90 Persen 10 Persen	7 Dokumen	193 Desa	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	8 Dokume n	100.000.000

2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Tenggarong	90 Persen 10 Persen	110 Dokumen	193 Desa	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	5 Dokumen	100.000.000
2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Tenggarong	90 Persen 10 Persen	1 Dokumen	193 Desa	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	120.000.000

2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	90 Persen 10 Persen	389 Dokumen	193 Desa	7.885.720.910	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	50 Dokumen	100.000.000

2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Tenggarong	90 Persen 10 Persen	72 Orang	193 Desa	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	0 Orang	2.716.085.828

2	13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawas an Peraturan Desa	Prosentase Status Desa Berkem bang Menjadi Desa Maju di Kukar	Kec. Tabang: Ds.Muara Salung Kec. Kenohan:Ds. Kahala,Teluk Bingkai,Kahala Ilir,Tubuhan Kec.Kota Bangun Darat:Ds.Sedulang,Kota Bangun III,Sumber Sari Kec. Kota Bangun:Ds. Loleng,Pela, Sebelimbing an Kec.Loa Janan:Loa Duri Seberang	90 Persen 10 Persen	15 Dokumen	193 Desa	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	15 Dokume n	100.000.000

									Kec. Loa Kulu:Ds.Jem bayan Ilir Kec. Muara Badak:Ds. Tanjung Limau,Muara Badak Ulu									
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaa n BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintaha n Dalam Kategori Baik Pertumbuha n Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembina a n dan Pemberda a yaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Prosentase Status Desa Berkem bang Menjadi Desa Maju di Kukar	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Desa	90 Persen 10 Persen	25 Dokumen	193 Desa	1.100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	11 Dokume n	100.000.000

						BUMDesa												

2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentia n Kepala Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintaha n Dalam Kategori Baik Pertumbuha n Pendapatan BUMDesa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangk atan dan Pemberhe ntian Kepala Desa	Prosentase Status Desa Berkem bang Menjadi Desa Maju di Kukar	Kec.Muara Muntai:Kayu Batu,Muara Aloh,Jantur Selatan,Pula u Harapan,Jantur,Ma.Munta i Ulu,Jantur Baru,Muara Leka,Batuq; Kec.Loa Kulu:Sepakat,Jongkang,S umber Sari,Loa Kulu Kota,Loh Sumber,Pon oragan,Rempanga,Jonggon Jaya,Lung	90 Persen 10 Persen	111 Laporan	193 Desa	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	0

									Anai;Kec.Lo a Janan:Batua h,Bakungan, Loa Duri Ulu,Loa Janan Ulu,Purwajay a,Tani Bhakti,Loa Duri Ilir;Kec.Ang gana:Ma.Pa ntuan,Tani Baru,Sungai Mariam,Sido mulyo,Handil Terusan;Kec .Ma.Badak : Ma.Badak Ulu,Gas Alam Badak									

									I,Badak Baru,Salik i,S alo Palai,Tana h Datar,Batu - Batu;Kec.T g r:Bendang Raya;Kec.S e bulu:Sebul u Ilir,Giri Agung,Mek ar Jaya,Sebul u Ulu,Sebul u Modern,Se le									

									rong,Tj.Harapan,Sumber Sari,Manung gal Daya;Kec. Kota Bangun:Sumber Sari,Sebelimbingan,Kota Bangun II,Benua Baru,Sedulang,Loleng, Pela,Kota Bangun III;Kec.Kenohan:Lamin Telihan,Kaha la Ilir,Tubuhan, Teluk Bingkai,Kahala;Kec.Kb. Janggut:Loa									

									Sakoh,Hambau,Kelekat,Long Beleh Modang;Kec.Ma.Kaman: Teratak,Sedulang,Panca Jaya,Cipari Makmur,Ma. Kaman Ulu,Sabintulung;Kec.Tabang:Long Lalang,Umaq Dian,Baru,U maq Tukung,Sidomulyo,Ma.Tiq,Ma.Salung, Ma.Kebq,M									

									a. Belinau,Ritan Baru,Bila Talang,Tuku ng Ritan;Kec. Samboja:Bukit Raya,Beringi n Agung,Tani Bhakti;Kec. Tgr Sbr:Manung gal Jaya,Bangun Rejo,Tj.Batu,									

									Bhuana Jaya,Emba lu t,Bukit raya,Kerta bu ana,Separi ,B ukit Pariaman, Pe rjiwa,Tlk Dalam,Loa Lepu,Suka Maju,Loa Pari;Kec.M ar ang Kayu:Kersi k, Prangat Baru,Sam ber a Baru,Pera ng at Selatan,Sa nt an Ulu,Bunga Putih,Sem an gko;Kec. Ma.Wis:En g gelam,Leb ak Mantan										

2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentia n Perangkat Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintaha n Dalam Kategori Baik Pertumbuha n Pendapatan BUMDesa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangk atan dan Pemberhe ntian Perangkat Desa	Prosentase Status Desa Berkem bang Menjadi Desa Maju di Kukar	Kec. Tabang:Long Lalang,Umaq Dian,Bila Talang, Kampung Baru,Umaq Bekuay,Muara Salung Kec. Kenohan:Kahala,Teluk Bingkai,Kaha la Ilir,Tubuhan Kec.Kota Bangun Darat:.Sedul ang,Kota Bangun III,Sumber Sari Kec. Kota Bangun:. Loleng,Pel	90 Persen 10 Persen	24 Laporan	193 Desa	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4 Laporan	100.000.000

									a, Sebelimbing an Kec.Loa Janan:Loa Duri Seberang Kec. Loa									

									Kulu: Ds.Jembaya n Ilir Kec. Muara Badak:Tanju ng Limau,Muara Badak Ulu									
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintaha n Dalam Kategori Baik Pertumbuha n Pendapatan BUMDesa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Prosentase Status Desa Berkem bang Menjadi Desa Maju di Kukar	Kabupaten Kutai Kartanegara	90 Persen 10 Persen	16 Dokumen	193 Desa	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Profil Desa	18 Dokume n	100.000.000
2	13	04	2.01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerinta	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajeme n	Prosentase Status Desa Berkem bang	Tenggarong	90 Persen 10 Persen	3 Dokumen	193 Desa	12.258.472.960	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	6 Dokume n	300.000.000

						ha n Dalam Kategori Baik Pertumbu ha n Pendapata n BUMDesa	Pemerint a han Desa	Menjad i Desa Maju di Kukar										
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerinta ha n Dalam Kategori Baik Pertumbu ha n Pendapata n BUMDesa	Jumlah Dokume n Hasil Fasilitasi Pengelola an Aset Desa	Prosent ase Status Desa Berke m bang Menjad i Desa Maju di Kukar	Kab. Kutai Kartanegar a, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	90 Persen a 10 Persen	2 Dokumen	193 Desa	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	25 Dokum e n	100.000.00 0
2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkata n Kapasitas Anggota BPD	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerinta ha n Dalam	Jumlah Anggota BPD yang Mengiku ti Pembina a n	Prosent ase Status Desa Berke m bang Menjad i Desa	Tenggarong	90 Persen 10 Persen	83 Orang	193 Desa	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	28 Orang	120.000.00 0

						Kategori Baik Pertumbuha n Pendapatan BUMDesa	Peningkat an Kapasitas	Maju di Kukar										

2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Tabang, Tenggarong	90 Persen 10 Persen	19 Desa	193 Desa	500.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	15 Desa	100.000.000
2	13	04	2.01	0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Tenggarong, Samarinda	90 Persen 10 Persen	19 Laporan	193 Desa	382.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	20 Laporan	100.000.000

2	13	04	2.01	0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewen angan Kabupaten/Kot a yang Dilaksanakan oleh Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintaha n Dalam Kategori Baik Pertumbuha n Pendapatan BUMDesa	Jumlah Dokumen Penugasa n Urusan/ Kewenanga n Kabupaten /Kota yang Dilaksana kan oleh Desa	Prosentase Status Desa Berkem bang Menjadi Desa Maju di Kukar	Tenggarong	90 Persen 10 Persen	1 Dokumen	193 Desa	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenan gan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	1 Dokume n	100.000.000
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembanga n Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintaha n Dalam Kategori Baik Pertumbuha n Pendapatan BUMDesa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembanga n Desa serta Lomba Desa dan Keluraha n	Prosentase Status Desa Berkem bang Menjadi Desa Maju di Kukar	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	90 Persen 10 Persen	387 Dokumen	193 Desa	400.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokume n	100.000.000

2	13	05			PROGRAM PEMBERDAY AAN LEMBAGA KEMASYARA KATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKA T HUKUM ADAT	19.346.924.500			Persentase Posyandu Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	70,35 Persen 100 Persen	2.165.000.000

2	13	05	2.01		Pemberdayaa n Lembaga Kemasyaraka tan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaa n Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/K ota serta Pemberdayaa n Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/K ota								19.346.924.500			Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	827 Lembaga	2.165.000.000
2	13	05	2.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Persentase Posyandu Aktif Persentase Lembaga Kemasyarak atan yang Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventaris asi Masyarak at Hukum Adat	Persentase Status Desa Berkem bang Menjadi Desa Maju di Kukar	Kec. Tabang: Muara Belinau, Muara Tiq, Muara Salung, Muara Kebaq, Muara Tuboq	64,07 Persen 100 Persen	6 Dokumen	824 Lembag a	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokume n	100.000.000

2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdaya a n dan Pendayagun a an Kelembagaa n Lembaga Kemasyara kat an Desa/Kelur aha n (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelur aha n dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Posyandu Aktif Persentase Lembaga Kemasyara k atan yang Aktif	Jumlah Dokume n Hasil Penataan , Pemberd a yaan dan Pendaya g unaan Kelemba g aan Lembaga Kemasya r akatan Desa/Kel u rahan (RT, RW, PKK, Posyand u, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kel u rahan dan Masyara k at	Prosent ase Status Desa Berke m bang Menjad i Desa Maju di Kukar	Tenggaron g, Samarinda ,K ec.Sebulu: Selerong,K e c.Loa Kulu:Jong go n Desa,Kec. Ko ta Bangun:Se b elimbingan ,L oleng,Kec. Kota Bangun Darat:Kota Bangun I,Wonosari ,K ec.Muara Kaman:Me na mang Kanan,Me na mang Kiri,Kupan g Baru,Bukit Jering,Lia	64,07 Persen 100 Persen	40 Dokumen	824 Lemba g a	690.000.0 00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaa n Kelembagaan Lembaga Kemasyarakat an Desa/Kelurah an (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurah an dan Masyarakat Hukum Adat	18 Dokum e n	150.000.0 00

							Hukum Adat		ng Buaya,Kec. Tabang:Long Lalang,Kamp ung Baru,Umaq Tukung,Bulu qsen,Tabang Lama,Kec. Marangkayu:Bunga Putih,Kec. Muara Wis:Muara Enggelam, Kec.Anggana: Tani Baru									

2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakat an Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Posyandu Aktif Persentase Lembaga Kemasyarak atan yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan Desa/Kelu rahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelu rahan dan Masyarak at Hukum Adat yang Ditingkatk an Kapasitas nya	Prosentase Status Desa Berkem bang Menjadi Desa Maju di Kukar	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Samarinda	64,07 Persen 100 Persen	4430 Lembaga	824 Lembag a	3.050.453.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7630 Lembag a	125.000.000

2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakat an Desa/Kelur aha n (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelur aha n dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Posyandu Aktif Persentase Lembaga Kemasyara k atan yang Aktif	Jumlah Sarana dan Prasaran a Kelemba g aan Lembaga Kemasya r akatan Desa/Kel u rahan (RT, RW, PKK, Posyand u, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kel u rahan dan Masyara k at Hukum Adat	Prosent ase Status Desa Berke m bang Menjad i Desa Maju di Kukar	Kec. Kembang Janggut, Muara Wis, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Muara Muntai, Sebulu, Muara Kaman, Tenggaron g, Tenggaron g Seberang, Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Samboja, Samboja Barat, Muara Jawa, Muara Badak, Marangkay u	64,07 Persen 100 Persen	540 Unit	824 Lemba g a	11.013.111. 000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakat an Desa/Kelurah an (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurah an dan Masyarakat Hukum Adat	60 Unit	120.000.00 0

2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembanga n Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase Posyandu Aktif Persentase Lembaga Kemasyarak atan yang Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembanga n Usaha Ekonomi Masyarak at dan Pemerinta h Desa dalam Meningkat kan Pendapata n Asli Desa	Prosentase Status Desa Berkem bang Menjadi Desa Maju di Kukar	Desa Selerong,Batu Batu,Beringi n Agung,Tani Bakti,Panca Jaya,Long Beleh Modang,Purwajaya,Sebul u Modern,Bila Talang,Uma q Bekuay,Belor o,Sungai Payang,Tani Bakti,Manun ggal Jaya,Santan Ilir,Sidomuly o,Tabang	100 Persen 57,79 Persen	51 Dokumen	824 Lembag a	650.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembanga n Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokume n	500.000.000

									Lama, Bukit Jering, Liang Buaya									
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Posyandu Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong ,Prov. Kalimantan Timur, Surabaya	100 Persen 57,79 Persen	1 Laporan	824 Lembaga	643.360.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	750.000.000
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	Persentase Posyandu Aktif Persentase Lembaga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan	Prosentase Status Desa Berke	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	100 Persen 57,79 Persen	4 Laporan	824 Lembaga	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong	1 Laporan	100.000.000

					Masyarakat	Kemasyarak atan yang Aktif	Bhakti Gotong Royong Masyarak at	m bang Menjadi Desa Maju di Kukar						Hasil		Royong Masyarakat		

2	13	05	2.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Persentase Posyandu Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Tenggarong	100 Persen 57,79 Persen	1 Dokumen	824 Lembaga	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	75.000.000
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Posyandu Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejaht	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen 57,79 Persen	53 Dokumen	824 Lembaga	2.650.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5 Dokumen	245.000.000

							er aan Keluarga											

BAB V
P E N U T U P

Renja ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara dalam tahun 2025, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja 2025 dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

A. CATATAN PENTING

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good, clean and open governance* di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana Kerja (Renja) ini kami buat dan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara,sehingga diharapkan dapat meningkatkan sinergisitas antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara dengan OPD yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang telah kami susun melalui Renja ini. Selain beberapa hal yang telah dipaparkan diatas, kami juga beberapa pointer catatan penting yaitu :

1. Dalam proses penyusunan Renja OPD diharapkan dapat mengakomodir aspirasi, terutama aspirasi masyarakat grass root. Dalam hal ini harus ada sinkronisasi antara waktu pelaksanaan Musrenbangdes dengan Musrenbang Kecamatan.
2. Meningkatkan kerjasama dan komunikasi simultas antar instansi guna menghasilkan ide-ide pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tersusun.

3. Menciptakan good and clean goverment dengan melakukan langkah- langkah penciptan legalitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dinaungi oleh payung atau produk hukum.

B. KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

a. Seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan- kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien.
b. Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2025, dimana Rencana Kerja Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
c. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025.
d. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2025 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tahapan tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.

C. TINDAK LANJUT

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara ini, ada beberapa langkah tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mengawal realisasinya. Diantaranya adalah :

a. Menjaga konsistensi Aparatur dalam menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah maupun Program Prioritas dan program Dedikasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam meningkatkan kinerja OPD;

b. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparatur serta sumber daya yang ada pada OPD;
c. Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik dengan Perangkat Daerah yang lain dalam pelaksanaan Program Kegiatan Lintas Perangkat Daerah guna menghindari friksi-friksi dan miss comunication dalam lingkungan OPD serta menigkatkan koordinasi dan kerjasama serta sinkronisasi sehingga menciptakan hubungan kerjasama yang sinergis;
d. Melakukan pressure (tekanan) terhadap Pemerintah Desa khususnya dalam memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan dan BUMDes dan BUMDesma dalam upaya pengembangan Ekonomi Unggulan Desa, dan Kerjasama Desa. untuk itu perlu adanya peningkatan kinerja serta menciptakan inovasi-inovasi dalam pelayanan publik maupun inovasi-inovasi yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa sehingga hasilnya mampu mengarah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kemandirian desa.

Rencana Kerja Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan penelaahan dan penyelarasan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergisitas, harmonisasi dan efektivitas serta efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

t.RENJA DINAS PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) Tahun, yang disusun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan Tahunan, selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yangdilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sebagai dokumen rencana Tahunan, RKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan Tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan PD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA–PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) pada Tahun 2025.

3. RENJA PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

Mengingat arti strategis RENJA PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan Tahunan pemerintah kabupaten, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Akhir Renja harus selaras dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Provinsi, hal ini tercantum pada lampiran Surat Edaran Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bapenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0008/M.PPN/01/2007-050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007, dimana disebutkan bahwa Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/Kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja PD hasil Forum Perangkat Daerah dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-PD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD.

Terkait dengan penyusunan Renja-PD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra dan Renja PD. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang tertuang di dalam Renstra PD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Daerah menciptakan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang lebih rasional dengan tetap memberikan peran partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 57);

1.3. Maksud dan tujuan

Penyusunan Rancangan Awal RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2025 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023 dan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2024.

Sedangakan tujuan disusunnya Rancangan Awal RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 menyesuaikan dengan lampiran Permendagri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA PD
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran RKPD

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Secara umum rata-rata capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 mencapai 98,6% dengan predikat “Sangat Tinggi” dan realisasi keuangan Rp28.978.400.436 dari pagu anggaran Rp33.748.231.239 (85,9%).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 (lima) Program. Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai target 82 (BB) dan realisasinya 95,35 (A) atau capaian kinerja sebesar 116,28%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu rekomendasinya adalah :

1. Mekanisme Pengumumpulan Data Kinerja Belum Didukung Pedoman atau SOP;
2. Pengumpulan Data Kinerja atas Rencana Aksi Telah Dilakukan Tetapi Belum Memuat Realisasinya Secara Berkala (Bulanan/Triwulanan/ Semester);
3. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment;
4. Pemantauan dan evaluasi rencana aksi belum memberikan alternatif perbaikan dan rekomendasi yang di tindak lanjuti

dalam bentuk langkah- langkah nyata sehingga tidak ada menunjukkan perbaikan setiap periode.

Rata-rata capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 100% dengan rincian sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target kinerja 4 dokumen, dengan realisasi 4 dokumen (100,00%) Penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ada 4 dokumen yaitu: Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja bulanan/ semesteran/ Tahunan.
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, target kinerja 2 Laporan, dengan realisasi 2 Laporan (100,00%)
c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, target kinerja 1 dokumen, dengan realisasi 1 dokumen (100,00%)
d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, target kinerja 100 ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis, dengan realisasi kinerja 100 ASN (100,00%) dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, target kinerja 15 ASN, dengan realisasi 15 ASN (100,00%)
e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, target kinerja 6 layanan, dengan realisasi 6 layanan (100,00%)
    1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, target kinerja 3 paket, dengan realisasi 3 paket (100,00%)
    2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, target kinerj 1 paket, realisasi kinerja 1 paket (100,00%)
    3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, target kinerja 3 paket, dengan realisasi 3 paket (100,00%)
    4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, target kinerja 10.800 dokumen, dengan realisasi 10.800 dokumen (100%)

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, target kinerja 160 laporan, dengan realisasi kinerja 160 laporan (100%)
6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, target kinerja 75.000 dokumen, dengan realisasi 75.000 dokumen (100%)

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, target kinerja 120 unit, dengan realisasi kinerja 120 unit (100,00%)
g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target kinerja 12 bulan, dengan realisasi 12 bulan (100%)
h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target kinerja 9 unit, dengan realisasi kinerja 9 unit (100%)

B. Program Pendaftaran Penduduk:

Indikator kinerja Program Pendaftaran Penduduk Tahun 2023 yaitu:

1. Persentase Kepemilikan KTP-el dengan target sebesar 99% dan realisasinya 99,23% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
2. Persentase Kepemilikan KIA dengan target sebesar 70% dan realisasinya 55,58% atau capaian kinerja sebesar 79,40%. Target kinerja tidak tercapai maksimal, kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :
    a. Kurangnya sumber daya manusia operator SIAK khususnya operator pencetakan KIA;
    b. Sarana prasarana yang harus disiapkan dalam mendukung kegiatan diatas yaitu, belanja cetak (Blangko KIA) dan ATK (Alat Tulis Kantor), komponen ATK yang harus terpenuhi adalah Ribbon Colour (RC) dan HDF Film sebagai toner pencetakan KIA. Rekomendasinya : menambah sumber daya manusia operator SIAK khususnya operator pencetakan KIA dan menambah peralatan pencetakan KIA mobile.

C. Program Pencatatan Sipil

Indikator kinerja Program Pencatatan Sipil Tahun 2023 yaitu :

1. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun dengan target sebesar 98% dan realisasinya 98,79% atau capaian kinerja sebesar 100,80%. Target kinerja tercapai.
2. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim dengan target sebesar 90% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 111,11%. Target kinerja tercapai melebihi dari yang ditargetkan. Tidak ada 43 kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu rekomendasinya adalah agar dipertahankan kinerja yang baik tersebut.
3. Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian dengan target sebesar 99% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 101%. Target kinerja tercapai melebihi dari yang ditargetkan. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu rekomendasinya adalah agar dipertahankan kinerja yang baik tersebut.

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator kinerja Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2023, yaitu : Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai dari yang ditargetkan. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, rekomendasinya adalah agar dipertahankan kinerja baik tersebut.

E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Indikator kinerja Program Pengelolaan Profil Kependudukan Tahun 2023 yaitu Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu rekomendasinya adalah agar dipertahankan kinerja yang baik tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan, dengan indikator kinerja pelayanan yang telah disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang dituangkan kedalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dan proyeksi untuk Tahun 2024 dan 2025 kami sajikan dalam bentuk Tabel TC.30 sebagai berikut :

Tabel TC.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2026

No	Indikator	Target Nasional 2022	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			82 (Baik)	84 (Baik)	86 (Baik)	88 (Sangat Baik)	90 (Sangat Baik)	81,76 (Baik)	81,76 (Baik)	86 (Baik)	88 (Baik)	
2	Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil			100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,60%	100%	100%	
3			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80 (BB)	82 (A)	84 (A)	86 (A)	88 (A)	85,63 (A)	93,35 (AA)	84 (A)	86 (A)	
4		99,2%	Persentase Kepemilikan KTP-el	99%	99%	99%	99%	99%	98%	99%	99%	99%	
5		40%	Persentase Kepemilikan KIA	50%	70%	90%	99%	99%	43%	56%	90%	99%	
6		95%	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	97%	98%	99%	99%	99%	94,80%	95,64%	99%	99%	
7			Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	85%	90%	95%	99%	99%	95%	99%	95%	95%	
8			Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	99%	99%	99%	99%	99%	100%	100%	99%	99%	
9			Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10			Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Rata-Rata Persentase Realisasi Capaian Kinerja Pelayanan									**111,51%**	**98,38%**	**100%**	**100%**	

Untuk pencapaian kinerja pelayanan, yang terdiri indikator tujuan, sasaran dan program dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 sebesar 86 (Baik) dan realisasinya 85,88 (Baik) atau capaian kinerja sebesar 99,70% (Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023). Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu rekomendasinya adalah :

a. Pencapaian hasil pengukuran IKM secara kumulatif adalah 85,88. Hal ini berarti secara umum pelaksanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Permen PAN RB No. 14 Tahun 2017 tergolong "Baik" diatas untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan;

b. Walaupun semua unsur terdapat nilai Baik semua namun perlu tetap memperbaiki dan mengevaluasi nilai yang menurun dari Tahun sebelumnya sebagaimana disebutkan dibawah ini:

   1. Persyaratan : Pada unsur tersebut sebenarnya sudah dilaksanakan maksimal oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sudah banyak memfasilitasi dengan beberapa pelayanan berbasis IT, sehingga hal tersebut sangatlah bagus, agar lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat namun terkadang syarat yang sudah ditetapkan terkadan tidak dibaca atau masyarakat tidak memahami proses melalui media online tersebut.
   2. Prosedur, Produk, kompetensi petugas Layanan mapupun Perilaku petugas Pelayanan :

      Sebenarnya media komunikasi, saran dan masukan sudah disiapkan serta sudah menggunakan media online, namun karena masyarakat kemungkinan tidak bisa membuka akses atau keterbatasan pengetahuan mauun informasi maka hal-hal seperti tersebut kurang menjadi perhatian. Untuk itu dapat diperhatikan dan di perbaiki sebagai salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah penilaian terhadap pelayanan kepada masyarakat, begitupun indikasi sub penilaian yang dirasa kurang lainnya.

2. Target Kinerja Indikator Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasinya 99,60% atau capaian kinerja sebesar 99,60%, target kinerja tercapai dari yang 13 ditargetkan, adapun persentase kekurangan dari pemenuhan pelayanan tersebut dikarenakan adanya permohonan warga yang tidak dapat diproses lebih lanjut karena kurangnya dokumen yang di syaratkan.

3. Target Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan nilai 82 (BB) dan realisasinya 93,35 (A) atau capaian kinerja sebesar 113,84% (Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Tahun 2023). Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja dengan rekomendasi adalah :
   a. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pada Disdukcapil;
   b. Pengumpulan Data Kinerja atas Rencana Aksi Telah Dilakukan Tetapi Belum Memuat Realisasinya Secara Berkala (Bulanan/Triwulanan/Semester);
   c. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment;
   d. Pemantauan dan evaluasi rencana aksi belum memberikan alternatif perbaikan dan rekomendasi yang di tindak lanjuti dalam bentuk langkah langkah nyata sehingga tidak ada menunjukkan perbaikan setiap periode.
4. Target Kinerja Indikator Persentase Kepemilikan KTP-el Tahun 2023 sebesar 99% dan realisasinya 99,23% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai maksimal. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kurangnya sumber daya manusia sehingga tidak maksimal dalam melakukan pelayanan langsung jemput bola terkait perekaman KTP-el bagi warga yang berumur 17 Tahun, rekomendasinya adalah perbanyak pelayanan langsung jemput bola perekaman dan pencetakkan KTP-el secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan data agregat penduduk untuk mengetahui lokasi-lokasi mana saja yang capaian kepemilikan KTP-el nya masih rendah.
5. Target Kinerja Indikator Persentase Kepemilikan KIA Tahun 2023 sebesar 70% dan realisasinya 55,58% atau capaian kinerja sebesar 79,4%. Target kinerja belum tercapai maksimal. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kurangnya sumber daya manusia sehingga tidak maksimal dalam melakukan pelayanan langsung jemput bola terkait pencetakkan KIA, rekomendasinya adalah perbanyak pelayanan langsung jemput bola pencetakkan KIA diseluruh kecamatan dan desa/kelurahan secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan data agregat penduduk untuk mengetahui

lokasi-lokasi mana saja yang capaian kepemilikan KIAnya masih rendah.

6. Target Kinerja Indikator Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun Tahun 2023 sebesar 98% dan realisasinya 98,79% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai maksimal. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kurangnya sumber daya manusia sehingga tidak maksimal dalam melakukan pelayanan langsung jemput bola terkait penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18, rekomendasinya adalah perbanyak pelayanan langsung jemput bola penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 diseluruh kecamatan dan desa/kelurahan secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan data agregat penduduk untuk mengetahui lokasi-lokasi mana saja yang capaian kepemilikan akta kelahirannya masih rendah.
7. Target Kinerja Indikator Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim Tahun 2023 sebesar 90% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 111,11%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja belum maksimalnya pelayanan langsung jemput bola terkait penerbitan dokumen Akta Perkawinan bagi warga non muslim yang sudah menikah secara agama, rekomendasinya adalah pertahankan kinerja yang sudah baik, dan tingkatkan kinerjanya disetiap kesempatan.
8. Target Kinerja Indikator Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian Tahun 2023 sebesar 99% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.
9. Target Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2023 Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan sebesar 100% dan realisasinya 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%, hal ini dikarenakan terealisasinya seluruh informasi terkait administrasi kependudukan seperti informasi melalui media brosur, spanduk cetak digital, media social/website, dan inovasi berupa VITAMIN BERTENAGA, LAYANAN ONLINE, BUNGA DESAKU target kinerja tercapai, tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, rekomendasinya adalah pertahankan kinerja yang sudah baik, dan tingkatkan kinerjanya disetiap kesempatan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 belum dapat di evaluasi secara maksimal, mengingat kegiatan Tahun Anggaran 2024 baru berjalan satu bulan, akan tetapi untuk capaian per 31 Desember 2023 dapat dilihat dengan rata-rata capaian diatas 85 %, hal ini dikarenakan dari 10 (sepuluh) indikator kinerja pelayanan rata-rata capaian kinerjanya mencapai 98,38%, untuk penjelasannya dapat dilihat pada uraian 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, adalah masih kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas terkait pemenuhan kebutuhan sebagai operator SIAK, serta banyaknya peralatan penunjang pelayanan penerbitan dokumen kependudukan seperti, peralatan perekaman yang sudah kadaluwarsa (out of product, out of sale, out of warranty) dan masih kurangnya Server yang mendukung pengelolaan database SIAK, pelayanan SIAK Terpusat dan digital ID. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana kerja. Tidak adanya budaya kerja yang kompetitif dengan penerapan *reward and punishment* yang dilakukan secara terus menerus dan terukur.

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Milenium Development Goals)

Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penjabaran dari visi misi Kabupaten Kutai Kartanegara akan sangat memberikan kontribusi positip terhadap pencapaian misi nasional yaitu “Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya” dengan fokus pada Reformasi Pelayanan Publik, adapun Motto dalam pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu : MEMBUAT MASYARAKAT BAHAGIA

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD

Tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

1. Masih kurang massifnya penyampaian informasi kepada masyarakat terkait perubahan kebijakan, prosedur dan persyaratan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, baik perubahan pelayanan kebijakan secara daring maupun luring.
2. Meningkatkan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, khusus pada menyediakan media komunikasi saran dan masukan.

Peluang dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

1. Komitmen Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam Misi Pertama Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani. Dengan Program Dedikasi : Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA), merupakan Program Dedikasi Kukar IDAMAN, yang ditujukan untuk membangun pola pikir dan sosio kultural tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi.
2. Adanya dukungan logistik balngko KTP-el yang tersedia sesuai kebutuhan di daerah dengan mekanisme hibah uang ke pemrintah pusat untuk penyediaan blangko KTP-el, serta dukungan program aplikasi SIAK Terpusat dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dikembangkan oleh Direktrorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan kepada masayarakat sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, selain itu Kutai Kartanegara merupakan salah satu lokasi Ibu Kota Negara (IKN) yang sudah mulai dibangun di Tahun 2023, hal ini akan memberikan peluang baru, seperti peningkatan ekonomi, terbukanya lapangan kerja baru dan lain sebagainya.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yg strategis prioritas Tahun yang direncanakan

Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

1. Penerapan Sistim Informasi Adimintrasi Kependudukan (SIAK) terpusat dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan reformasi mendasar pengelolaan dan pelayanan administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil secara modern yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);

2. Dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pencegahan Stunting terkait pemanfaatan data penduduk yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga data tersebut dapat digunakan secara akuntabel, efektif dan tepat guna.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari Rancangan Awal Rencana Kerja PD yang telah disusun pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan Tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. (Lihat Tabel T-C.31)

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kutai Kartanegara

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	86 (Baik)	20.129.551.038,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	86 (Baik)	20.458.016.694,00	
			Persentase Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	100%					Persentase Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	100%		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)	17.283.657.832,00	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)	17.701.397.894,00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	150.000.000,00	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	150.000.000,00	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	150.000.000,00	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	150.000.000,00	

2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel**	**2 Laporan**	**10.579.806.192,00**	**2**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel**	**2 Laporan**	**10.908.271.840,00**	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/Bulan	10.282.266.192,00	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/Bulan	10.610.731.840,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	297.540.000,00	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	297.540.000,00	
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**25.000.000,00**	**3**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**25.000.000,00**	
4	Rekonsiles dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**4 Dokumen**	**100.000.000,00**	**4**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**4 Dokumen**	**100.000.000,00**	
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	50.000.000,00	5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	50.000.000,00	
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	50.000.000,00	6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	50.000.000,00	Diperlukan Penambahan Jumlah Peserta dan Pagu Anggaran BIMTEK
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6 Layanan**	**3.175.751.602,00**	**5**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6 Layanan**	**3.175.751.602,00**	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1.611.578.882,00	7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1.611.578.882,00	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.750.000,00	8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.750.000,00	Diperlukan Penambahan Jumlah Rincian Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	549.999.970,00	9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	549.999.970,00	Diperlukan Penambahan Anggaran Belanja Hibah Uang Ke Pemerintah Pusat untuk Pengadaan Blangko KTP-el sebanyak 50.000 keping
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10.800 Dokumen	45.000.000,00	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10.800 Dokumen	45.000.000,00	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	783.574.000,00	11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	783.574.000,00	
12	Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD	75.000 Dokumen	151.848.750,00	12	Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD	75.000 Dokumen	151.848.750,00	
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**95 Unit**	**1.895.000.000,00**	**6**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**95 Unit**	**1.895.000.000,00**	
13	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	490.000.000,00	13	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	490.000.000,00	
14	Pengadaan Mebel	Tenggarong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	25.000.000,00	14	Pengadaan Mebel	Tenggarong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	25.000.000,00	
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	75 Unit	1.410.000.000,00	15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	75 Unit	1.240.000.000,00	Pengurangan Pagu Anggaran untuk ditambahkan ke Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Sub Kegiatan Pengadaan dan Penyajian Data Kependudukan
16	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong, Kota Bangun, Kembang Janggut, Muara Badak dan Muara Jawa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	70.000.000,00	16	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong, Kota Bangun, Kembang Janggut, Muara Badak dan Muara Jawa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	140.000.000,00	Penambahan Sewa Gedung Kantor UPT Muara Badak, Muara Jawa, sewa stand pameran Erau dan Perstiwa Wanah Putih Singa Singa

7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12 Laporan**	**1.108.690.038,00**	**7**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12 Laporan**	**1.297.963.634,00**	
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	44.891.000,00	17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	44.891.000,00	
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	278.665.978,00	18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	278.665.978,00	
19	Penyediaan Jasa Perakitan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perakitan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	31.210.000,00	19	Penyediaan Jasa Perakitan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perakitan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	31.210.000,00	Diperlukan Penambahan Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Pendingin (AC), Personal Komputer dan Printer
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	753.923.060,00	20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	943.196.656,00	Penambahan Jasa Tenaga Ahli (1 Ahli Jaringan, 1 Programmer, 1 Multimedia dan 2 Penjaga Malam/Walker)
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**9 Unit**	**149.410.000,00**	**8**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**9 Unit**	**149.410.000,00**	
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	49.410.000,00	21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	49.410.000,00	Diperlukan Penambahan Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Roda 2 dan Roda 4
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	
II	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		**2. Persentase Kepemilikan KTP-el**	**99%**	**650.000.000,00**	**II**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		**2. Persentase Kepemilikan KTP-el**	**99%**	**650.000.000,00**	
			3. Persentase Kepemilikan KTA	**90%**	**350.000.000,00**				**3. Persentase Kepemilikan KTA**	**90%**	**350.000.000,00**	
9	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**		**Jumlah pelayanan dokumen pendaftaran penduduk yang di terbitkan**	**200.002 Dokumen**	**1.000.000.000,00**	**9**	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**		**Jumlah pelayanan dokumen pendaftaran penduduk yang di terbitkan**	**200.002 Dokumen**	**1.000.000.000,00**	
23	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	200.000.000,00	23	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	200.000.000,00	Pengurangan Pagu Anggaran untuk ditambahkan ke Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
24	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	200.000 Dokumen	450.000.000,00	24	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	150.000 Dokumen	450.000.000,00	Pengurangan Pagu Anggaran untuk ditambahkan ke Sub Kegiatan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
25	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	350.000.000,00	25	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	350.000.000,00	Pengurangan Pagu Anggaran untuk ditambahkan ke Sub Kegiatan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
III	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		**4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun**	**99%**	**450.000.000,00**	**III**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		**4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun**	**99%**	**350.000.000,00**	
			5. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	**95%**	**250.000.000,00**				**5. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim**	**95%**	**300.000.000,00**	
			6. Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	**99%**	**410.893.206,00**				**6. Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian**	**99%**	**321.619.610,00**	
10	**Pelayanan Pencatatan Sipil**		**Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan**	**1101 Dokumen**	**860.893.206,00**	**10**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**		**Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan**	**1101 Dokumen**	**671.619.610,00**	
26	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1100 Dokumen	410.893.206,00	26	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1100 Dokumen	321.619.610,00	Diperlukan Pengurangan Pagu Anggaran untuk ditambahkan ke Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
27	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Semua Kecamatan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Dokumen	450.000.000,00	27	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Semua Kecamatan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Dokumen	350.000.000,00	Diperlukan Pengurangan Pagu Anggaran untuk ditambahkan ke Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
11	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**		**Jumlah laporan pelayanan dokumen akta perkawinan non muslim yang di terbitkan**	**1 Laporan**	**250.000.000,00**	**11**	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**		**Jumlah laporan pelayanan dokumen akta perkawinan non muslim yang di terbitkan**	**1 Laporan**	**300.000.000,00**	
28	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1 Laporan	350.000.000,00	28	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1 Laporan	300.000.000,00	Diperlukan Pengurangan Pagu Anggaran untuk ditambahkan ke Sub Kegiatan Kerjadasan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Sub Kegiatan Pengadaan dan Penyajian Data Kependudukan

IV	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**		**7. Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan**	**100%**	**475.000.000,00**	**IV**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**		**7. Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan**	**100%**	**625.000.000,00**	
12	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**		**Jumlah dokumen PKS dan Penyajian Database Kependudukan**	**12 Dokumen**	**200.000.000,00**	**12**	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**		**Jumlah dokumen PKS dan Penyajian Database Kependudukan**	**12 Dokumen**	**350.000.000,00**	
28	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dokumen	100.000.000,00	29	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dokumen	250.000.000,00	Diperlukan Penambahan Anggaran untuk pencapaian target nasional peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) 15% (127.000 orang) dari Total Perekaman (513.121 org)
30	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	11 Dokumen	100.000.000,00	30	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	11 Dokumen	100.000.000,00	
13	**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**Jumlah dokumen Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**1 Dokumen**	**75.000.000,00**	**14**	**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**Jumlah dokumen Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**1 Dokumen**	**75.000.000,00**	
31	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen	75.000.000,00	32	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen	75.000.000,00	
14	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi**	**1 Laporan**	**200.000.000,00**	**13**	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi**	**1 Laporan**	**200.000.000,00**	
32	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	200.000.000,00	33	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	200.000.000,00	
V	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**		**8. Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan**	**100%**	**160.000.000,00**	**V**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**		**8. Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan**	**100%**	**160.000.000,00**	
15	**Penyusunan Profil Kependudukan**		**Jumlah dokumen Data Kependudukan dan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan**	**2 Dokumen**	**160.000.000,00**	**15**	**Penyusunan Profil Kependudukan**		**Jumlah dokumen Data Kependudukan dan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan**	**2 Dokumen**	**160.000.000,00**	
33	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110.000.000,00	33	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110.000.000,00	PROGRAM DISAPA
34	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 Dokumen	50.000.000,00	34	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 Dokumen	50.000.000,00	
				Jumlah	**20.129.551.038,00**					**Jumlah**	**20.458.016.694,00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah perencanaan pembangunan merupakan wadah penyusunan rencana pembangunan Tahunan daerah atau yang dikenal dengan RKPD,. Musrenbang merupakan upaya memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. “Amanat tersebut dengan menyelesaikan penyusunan RPJMD Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025, menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan.

Musrenbang sebagai forum antar pelaku pembangunan menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah akan berfungsi menghasilkan kesepakatan antar pelaku mengenai RKPD yang dititik beratkan pada pembahasan mensinkronisasikan rencana kegiatan antar Perangkat Daerah (PD) dan antar Pemerintah Daerah sebagai pengusung rancangan rencana kerja PD dengan masyarakat yang mengusulkan prioritas hasil musrenbang kecamatan, adapun data-data usulan program dan kegiatan masyarakat terdiri dari :

a. Data usulan dari kecamatan yg difasilitasi dgn kegiatan Musrenbang Kecamatan.
b. Data usulan dari SKPD yang tertuang dalam RENJA Awal SKPD.
c. Data MUSRENBANG Tingkat Kabupaten, yaitu hasil dari Forum Gabungan SKPD dimana usulan Kecamatan dan Usulan SKPD di kompilasi menghasilkan kesepakatan baru yang difasilitasi dalam kegiatan MUSRENBANG Kabupaten.
d. Renja awal SKPD merupakan hasil dari Musrenbang Tingkat Kabupaten yang sudah mempunyai Kode Rekening yang akan dilanjutkan untuk proses RKPD dengan memperhatikan Pagu Indikatif, apabila ada usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Untuk Tahun 2024 maka akan kami tampilkan pada Tabel 2.5 dibawah ini, dan jika tidak ada usulan, maka hanya tabel kosong yang kami tampilkan.

Berdasarkan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kabupaten yang kami hadiri pada Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak terdapat usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari para pemangku kepentingan, baik dari hasil musrenbang maupun pokok pikiran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.5 (TC.32)

Tidak ada usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara

No.	Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

   Pada hakekatnya adalah upaya Tertib Dokumen Kependudukan atau Tertib Administrasi Kependudukan secara terpadu melalui digitalisasi identitas, tidak hanya sekedar pengawasan terhadap pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis, artinya mudah difahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui/mengesahkan status kependudukan atau peristiwa penting yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain dokumen kependudukan memiliki manfaat bagi si pemegang dokumen atau penduduk. Upaya tersebut, merupakan tugas negara atau pemerintah sebagai pelayan publik, dan menjadi urusan wajib. Untuk itu, faktor-faktor strategis yang harus ditata dan disiapkan agar tugas tersebut berfungsi dan efektif, adalah :

   a. Menyiapkan perangkat infrastruktur untuk melakukan monitoring terhadap kondisi perangkat yang ada;
   b. Melakukan peremajaan perangkat yang sudah kadaluwarsa (out of product, out of sale, out of warranty); dan
   c. Memetakan kondisi database Kependudukan untuk persiapan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

2. Dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Program Pencegahan Stunting.

   a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan BKKBN menyediakan data kependudukan untuk mensukseskan program keluarga Sejahtera dalam upaya menekan angka *stunting* di Indonesia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memastikan setiap anak usia 0-18 Tahun mendapatkan dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA);

b. Data Kependudukan sangat strategis untuk mempermudah berbagai pelayanan publik, tidak hanya vaksinasi dan stunting, kedepan banyak program prioritas pemerintah yang memerlukan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

3. Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Di Seluruh Indonesia.
   a. Perbaikan terhadap keluhan masyarakat dalam layanan Administrasi Kependudukan;
   b. Pelaksanaan regulasi baru bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   c. Persiapan penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024
4. Memastikan Pencapaian Target Nasional Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
   a. Mewujudkan target kinerja perekaman KTP-el mencapai 99,4%
   b. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran mencapai 98%;
   c. Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 70% diTahun 2023;
   d. Menyelenggarakan buku pokok pemakaman 50% desa/kelurahan memilik buku Pokok Pemakaman dan di dorong 50% Kompleks Pemakaman memiliki BPP;
   e. Melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan di tingkat Kabupaten sebanyak 15 OPD;
   f. Mewujudkan akses data dalam pemanfaatan data kependudukan di tingkat kabupaten sebanyak 15 OPD;
   g. Membuat inovasi tiap semester minimal 1 inovasi, seTahun 2 inovasi;
   h. Mewujudkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) mencapai 25% dari total capaian perekaman.
5. Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masih belum mencapai target nasional berkomitmen mengambil langkah-langkah percepatan untuk menyelesaikan target.
6. Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 Tahun kedepan (kapan). Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu, Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan Indikator Kinerja Tujuannya adalah *Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu Tahunan, semesteran, Triwulan dan bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) Tahun kedepan. Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara menetapkan sasaran untuk Tahun anggaran 2021-2026 adalah *Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, dengan Indikator Kinerja Sasarannya adalah *Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai Tujuan *Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan* Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara dengan Sasaran *Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, dengan Indikator Kinerja Sasarannya adalah *Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2025 berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun berdasarkan :

a. Pencapaian Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara;
b. Berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan nasional;
c. Peningkatan tugas dan fungsi kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2025 berdasarkan Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuktahirannya, direncanakan berjumlah 5 (lima) Program dengan 15 (lima belas) Kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan yang dibiayai melalui anggaran APBD, yang sebagian besar merupakan Program Prioritas Bupati terpilih dan Kegiatan koordinasi dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif pada APBD Murni adalah sebesar Rp20.129.551.038,00 untuk rencana prakiraan maju Tahun 2025 kebutuhan dana/pagu indikatifnya adalah sebesar Rp22.939.517.753,00 dengan jumlah Program sebanyak 5 (lima) Program dengan 15 (lima belas) Kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan.

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II, terhadap Program tidak ada perbedaan dengan RPJMD Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dituangkan didalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, terdapat beberapa sub kegiatan baru yang akan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan atau ketersediaan anggaran serta percepatan pencapaian target kinerja yang akan dicapai, adapun Rancangan

Akhir Rencana Kerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2025 untuk lebih jelasnya Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada Tabel TC.33 sebagai berikut :

Tabel T-C.33

Rumusan Rancangan Akhir Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		86	(Baik)	22.047.290.290,00			88	(Sangat Baik)	20.904.551.038,00
						Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil		100	Persen				100	Persen	
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah		84	(A)	18.776.397.084,00			86	(A)	17.633.657.832,00
2	12	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	Dokumen	1.100.000.000,00			4	Dokumen	800.000.000,00
2	12	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Tenggarong	3	Dokumen	450.000.000,00	APBD		3	Dokumen	150.000.000,00
2	12	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	4	Laporan	150.000.000,00	APBD		4	Laporan	150.000.000,00
2	12	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	Tenggarong	1	Laporan	150.000.000,00	APBD		1	Laporan	150.000.000,00
2	12	01	2,01	08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata	Tenggarong	1	Dokumen	50.000.000,00	APBD		1	Dokumen	50.000.000,00
2	12	01	2,01	09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dihasilkan	Tenggarong	1	Data	250.000.000,00	APBD		1	Data	250.000.000,00
2	12	01	2,01	10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah	Tenggarong	1	Berita Acara	50.000.000,00	APBD		1	Berita Acara	50.000.000,00

2	**12**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel**		**2**	**Laporan**	**10.958.271.848,00**			**2**	**Laporan**	**10.629.806.192,00**
2	12	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	100	Orang/Bulan	10.610.731.848,00	APBD		100	Orang/Bulan	10.282.266.192,00
2	12	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong	1	Laporan	25.000.000,00	APBD		1	Laporan	25.000.000,00
2	12	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	1	Laporan	297.540.000,00	APBD		1	Laporan	297.540.000,00
2	12	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong	1	Dokumen	25.000.000,00	APBD		1	Dokumen	25.000.000,00
2	**12**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**		**1**	**Dokumen**	**100.000.000,00**			**1**	**Dokumen**	**100.000.000,00**
2	12	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	1	Dokumen	25.000.000,00	APBD		1	Laporan	25.000.000,00
2	12	01	2,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	1	Laporan	50.000.000,00	APBD		1	Laporan	50.000.000,00
2	12	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	1	Laporan	25.000.000,00	APBD		1	Laporan	25.000.000,00
2	**12**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**		**4**	**Dokumen**	**100.000.000,00**			**4**	**Dokumen**	**100.000.000,00**
2	12	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	100	Orang	50.000.000,00	APBD		100	Orang	50.000.000,00
2	12	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	35	Orang	50.000.000,00	APBD	Penambahanan Jumlah Peserta dan Pagu Anggaran BIMTEK	15	Orang	50.000.000,00
2	**12**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**6**	**Layanan**	**3.175.751.602,00**			**6**	**Layanan**	**3.125.751.602,00**
2	12	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tenggarong	3	Paket	1.611.578.882,00	APBD		3	Paket	1.561.578.882,00
2	12	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tenggarong	1	Paket	33.750.000,00	APBD	Diperlukan Penambahanan Jumlah Rincian Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1	Paket	33.750.000,00
2	12	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tenggarong	3	Paket	549.999.970,00	APBD	Diperlukan Penambahan Anggaran Belanja Hibah Uang Ke Pemerintah Pusat untuk Pengadaan Blangko KTP-el sebanyak 50.000 keping	3	Paket	549.999.970,00
2	12	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tenggarong	10800	Dokumen	45.000.000,00	APBD		10800	Dokumen	45.000.000,00
2	12	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	160	Laporan	783.574.000,00	APBD		160	Laporan	783.574.000,00
2	12	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	75000	Dokumen	151.848.750,00	APBD		75000	Dokumen	151.848.750,00

2	**12**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**95**	**Unit**	**1.895.000.000,00**			**80**	**Unit**	**1.620.000.000,00**
2	12	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tenggarong	6	Unit	490.000.000,00	APBD		6	Unit	490.000.000,00
2	12	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tenggarong	10	Unit	25.000.000,00	APBD		10	Unit	25.000.000,00
2	12	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tenggarong	75	Unit	1.240.000.000,00	APBD	Pengurangan Pagu Anggaran untuk ditambahkan ke Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	60	Unit	1.035.000.000,00
2	12	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tenggarong , Kota Bangun, Kembang Janggut, Muara Badak dan Muara Jawa	4	Unit	140.000.000,00	APBD	Penambahan Sewa Gedung Kantor UPT Muara Badak, Muara Jawa, sewa stand pameran Erau dan Peristiwa Merah Putih Sanga Sanga	4	Unit	70.000.000,00
2	**12**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**		**12**	**Laporan**	**1.297.963.634,00**			**12**	**Laporan**	**1.108.690.038,00**
2	12	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	12	Laporan	44.891.000,00	APBD		12	Laporan	44.891.000,00
2	12	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tenggarong	12	Laporan	278.665.978,00	APBD		12	Laporan	278.665.978,00
2	12	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tenggarong	12	Laporan	31.210.000,00	APBD	Diperlukan Penambahan Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Pendingin (AC), Personal Komputer dan Printer	12	Laporan	31.210.000,00
2	12	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tenggarong	12	Laporan	943.196.656,00	APBD	Penambahan Jasa Tenaga Ahli (1 Ahli Jaringan, 1 Programemer, 1 Multimedia dan 2 Penjaga Malam/Wakar)	12	Laporan	753.923.060,00
2	**12**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah**		**9**	**Unit**	**149.410.000,00**			**9**	**Unit**	**149.410.000,00**
2	12	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tenggarong	8	Unit	49.410.000,00	APBD	Penambahan Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Roda 2 dan Roda 4	16	Unit	49.410.000,00
2	12	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Tenggarong	1	Unit	100.000.000,00	APBD		1	Unit	100.000.000,00
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**2. Persentase Kepemilikan KTP-el**		**99**	**Persen**	**875.000.000,00**			**99**	**Persen**	**875.000.000,00**
						3. Persentase Kepemilikan KIA		**90**	**Persen**	**350.000.000,00**			**99**	**Persen**	**350.000.000,00**
2	**12**	**02**	**2,01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah pelayanan dokumen pendaftaran penduduk yang di terbitkan**		**200.002**	Dokumen	**1.225.000.000,00**			**200.002**	Dokumen	**1.225.000.000,00**
2	12	02	2,01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	1	Dokumen	425.000.000,00	APBD	Pengurangan Pagu Anggaran untuk ditambahkan ke Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Dokumen	425.000.000,00
2	12	02	2,01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	150.000	Dokumen	450.000.000,00	APBD	Pengurangan Pagu Anggaran untuk ditambahkan ke Sub Kegiatan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000	Dokumen	450.000.000,00
2	12	02	2,01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	1	Laporan	350.000.000,00	APBD	Pengurangan Pagu Anggaran untuk ditambahkan ke Sub Kegiatan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Laporan	350.000.000,00

2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun**		**99**	**Persen**	**500.000.000,00**			**99**	**Persen**	**500.000.000,00**
						5. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim		**95**	**Persen**	**350.000.000,00**			**95**	**Persen**	**350.000.000,00**
						6. Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian		**99**	**Persen**	**560.893.206,00**			**99**	**Persen**	**560.893.206,00**
2	**12**	**03**	**2,01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan**		**1101**	**Dokumen**	**1.060.893.206,00**			**1301**	**Dokumen**	**1.060.893.206,00**
2	12	03	2,02	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Semua Kecamatan	1100	Dokumen	560.893.206,00	APBD	Pengurangan Pagu Anggaran untuk ditambahkan ke Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1300	Dokumen	560.893.206,00
2	12	03	2,02	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Semua Kecamatan	1	Layanan	500.000.000,00	APBD	Pengurangan Pagu Anggaran untuk ditambahkan ke Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Layanan	500.000.000,00
2	**12**	**03**	**2,02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Jumlah laporan pelayanan dokumen akta perkawinan non muslim yang di terbitkan**		**1**	**Laporan**	**350.000.000,00**			**1**	**Laporan**	**350.000.000,00**
2	12	03	2,02	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Semua Kecamatan	1	Laporan	350.000.000,00	APBD	Pengurangan Pagu Anggaran untuk ditambahkan ke Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	1	Laporan	350.000.000,00
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**7. Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan**		**100**	**Persen**	**475.000.000,00**			**100**	**Persen**	**475.000.000,00**
2	**12**	**04**	**2,01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Jumlah dokumen PKS dan Penyajian Database Kependudukan**		**12**	**Dokumen**	**200.000.000,00**			**12**	**Dokumen**	**200.000.000,00**
2	12	04	2,01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Semua Kecamatan	1	Dokumen	100.000.000,00	APBD	Penambahan Anggaran untuk pencapaian target nasional peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) 25% (127.000 orang) dari Total Perekaman (523.121 orang)	1	Dokumen	100.000.000,00
2	12	04	2,01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Semua Kecamatan	11	Dokumen	100.000.000,00	APBD		11	Dokumen	100.000.000,00
2	**12**	**04**	**2,02**		**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah dokumen Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**1**	**Dokumen**	**75.000.000,00**			**1**	**Dokumen**	**75.000.000,00**
2	12	04	2,02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Semua Kecamatan	1	Dokumen	75.000.000,00	APBD		1	Dokumen	75.000.000,00
2	**12**	**04**	**2,03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi**		**1**	**Laporan**	**200.000.000,00**			**1**	**Laporan**	**200.000.000,00**
2	12	04	2,03	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	1	Laporan	200.000.000,00	APBD		1	Laporan	200.000.000,00
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**8. Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan**		**100**	**Persen**	**160.000.000,00**			**100**	**Persen**	**160.000.000,00**
2	**12**	**05**	**2,01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Jumlah dokumen Data Kependudukan dan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan**		**2**	**Dokumen**	**160.000.000,00**			**2**	**Dokumen**	**160.000.000,00**
2	12	05	2,01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	1	Dokumen	110.000.000,00	APBD	**PROGRAM DISAPA**	1	Dokumen	110.000.000,00
2	12	05	2,01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Semua Kecamatan	1	Dokumen	50.000.000,00	APBD		1	Dokumen	50.000.000,00
									Jumlah	**22.047.290.290,00**				**Jumlah**	**20.904.551.038,00**

BAB V
PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) DISDUKCAPIL Tahun 2025 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis DISDUKCAPIL Tahun 2021-2026 yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DISDUKCAPIL, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025, serta merupakan kesinambungan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

5.1. Catatan Penting

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) DISDUKCAPIL Tahun 2025 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2025. Yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) DISDUKCAPIL daan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 Urusan Wajib Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Sedangkan apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran Tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dengan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) DISDUKCAPIL Tahun 2024 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Penambahan Pagu Sub Kegiatan lebih dikarenakan untuk mendukung Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, yaitu Program DISAPA atau Program Digitalisasi Pelayanan Publik yang merupakan Program Dedikasi Kukar IDAMAN, yang ditujukan untuk membangun

mindset dan culturset tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi, selain dari itu DISDUKCAPIL berupaya mendukung peningkatan pelayanan keikutsertaan BPJS masyarakat yang terdapat pada Desa yang berstatus Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal, selanjutnya turut serta mendukung pengentasan kemiskinan dengan cara memberikan verifikasi faktual data berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data yang dimiliki oleh Dewan Masjid Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga data penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat sesuai dengan yang ada dilapangan, selain mendukung pengentasan kemiskinan DISDUKCAPIL juga turut serta membantu menurunkan angka stunting anak melalui program RAGAPANTAS dengan cara pemenuhan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi anak yang menderita stunting, selain dari itu penambahan pagu anggaran sangat dibutuhkan karena adanya penambahan Kecamatan Baru, yaitu Kecamatan Kota Bangun Darat, Samboja Barat, dan perubahan nama desa serta antisipasi pemekaran RT, Desa dan Kecamatan, hal ini akan mempengaruhi bertambahnya kebutuhan logistik blangko KTP-el terkait pencetakkan KTP-el bagi penduduk yang terdampak perubahan tersebut.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan didukung oleh seluruh *stakeholders* termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;

2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
4. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pokok dan Unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaannya;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJMD, Pelaksanaan RPJMD, Pengawasan pelaksanaan RPJMD, serta evaluasi pelaksanaan RPJMD;
6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;

7. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dilakukan pada Tahun kedua dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi Tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara secara sendiri (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka *clean goverment* and *good governance* (Dunia Usaha, Masyarakat dan Pemerintahan).

5.3. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana tindak lanjut Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 akan dilanjutkan ketahapan penyusunan Rancangan Akhir Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi dengan BAPPEDA dan Tim Gugus Tugas Kukar Idaman, selanjutnya inputing ke aplikasi SIPD 2025 menyesuaikan dengan perubahan atas analisis kebutuhan perangkat daerah.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

u.RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan, selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD), yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yangdilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan PD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025.

3. RENJA PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Daerah menciptakan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang lebih rasional dengan tetap memberikan peran partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8 Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9 Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

13 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

15 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3 Maksud dan tujuan

Penyusunan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2021 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

Sedangakan tujuan disusunnya RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

15.1. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.4 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1.5 Tujuan dan Sasaran Renja PD

1.6 Program dan KegiatanBAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Pelaksanaan kegiatan Diskominfo Tahun 2023 secara umum selaras dengan Renja Dinas Kominfo 2023, demikian juga untuk tahun berjalan yaitu tahun 2024. Adapun Evaluasi terhadap Capaian Program Kegiatan tahun 2023 sebagai Berikut :

1) Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

   Tidak ada Program Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

2) Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

   Kegiatan : Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan :

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Target 6 Dokumen Realisasi 6 Dokumen (100%)
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Target 10 Dokumen Realisasi 10 Dokumen (100%)

   Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan :

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Target 912 Orang/Bulan Realisasi 899 Orang/Bulan (98,57%)
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Target 4 Laporan Realisasi 4 Laporan (100%)

   Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan :

   a. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Target 4 Laporan Realisasi 4 Laporan (100%)

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Target 4 Paket, Realisasi 4 Paket (100%)
b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Target 66 Orang Realisasi 66 Orang (100%)

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Target 2 Paket Realisasi 2 Paket (100%)
b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Target 1 Paket Realisasi 1 Paket (100%)
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target 1 Paket Realisasi 1 Paket (100%)
d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Target 50 Laporan Realisasi 49 Laporan (98%)
e. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Target 2 Dokumen Realisasi 2 Dokumen (100%)

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Target 6 Unit Realisasi 6 Unit (100%)
b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Target 93 Unit Realisasi 93 Unit (100%)

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target 1 LaporanRealisasi 1 Laporan (100%)
b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Target 1 Laporan Realisasi 1 Laporan (100%)
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Target 4 Laporan Realisasi 4 Laporan (100%)

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Target 36 Unit Realisasi 35 Unit (97,22%)
b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Target 3 Unit Realisasi 3 Unit (100%)
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Target 147 Unit Realisasi 147 Unit (100%)

2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Target 2 Dokumen Realisasi 2 Dokumen (100%)
b. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Target 2 Dokumen Realisasi 2 Dokumen (100%)
c. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah Target 2 Dokumen Realisasi 2 Dokumen (100%)
d. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Target 8 Dokumen Realisasi 8 Dokumen (100%)
e. Pengelolaan Media Komunikasi Publik Target 3 Dokumen Realisasi 3 Dokumen (100%)
f. Pelayanan Informasi Publik Target 5 Dokumen Realisasi 5 Dokumen (100%)
g. Layanan Hubungan Media Target 250 Layanan Realisasi 250 Layanan (100%)
h. Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan Target 100 Dokumen Realisasi 100 Dokumen (100%)
i. Manajemen Komunikasi Krisis Target 1 Dokumen Realisasi 1 Dokumen (100%)
j. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Target 1 Dokumen Realisasi 1 Dokumen (100%)

k. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Target 6 Dokumen Realisasi 6 Dokumen (100%)

3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Kegiatan : Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

sub Kegiatan :

a. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Target 1 Unit Realisasi 1 Unit (100%)
b. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Target 2 Unit Realisasi 2 unit (100%)
c. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Target 4 Dokumen Realisasi 3 Dokumen (75%)
d. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Target 16 Dokumen Realisasi 16 Dokumen (100%)
e. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) Target 66 Dokumen Realisasi 60 Dokumen (90,91%)
f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE Target 2 Dokumen Realisasi 2 Dokumen (100%)

Kegiatan : Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Target 61 Unit Realisasi 61 Unit (100%)

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Target 2 Dokumen Realisasi 2 Dokumen (100%)
b. Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Target 130 Orang Realisasi 130 Orang (100%)

c. Membangun Metadata Statistik Sektoral Target 4 Dokumen Realisasi 4 Dokumen (100%)
d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik SektoralTarget 116 Orang Realisasi 116 Orang (100%)
e. Pengembangan Infrastruktur Target 18 Unit Realisasi 18 Unit (100%)
f. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah Target 2 Dokumen Realisasi 2 Dokumen (100%)

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan :

a. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Target 1 Laporan Realisasi 1 Laporan (100%)
b. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Target 1 Laporan Realisasi 1 Laporan (100%)
c. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Target 1 Perangkat Daerah Realisasi 1 Perangkat Daerah (100%)

Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota

Sub Kegiatan :

a. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Target 1 Perangkat Daerah Realisasi 1 Perangkat Daerah (100%)

3) Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tidak ada Program Kegiatan yang melebihi target Kinerja

4) Adapun Faktor – Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya Target Kinerja Program Kegiatan antara lain :

Secara umum Target Kinerja Program Kegiatan tidak memiliki kendala atau permasalahan yang bisa menyebabkan tidak tercapainya target Kinerja Program Kegiatan, hanya beberapa

permasalahan terkait Terlambatnya Regulasi yang menyebabkan terlambatnya Proses pelaksanaan kegiatan, tidak terlaksananya Forum Lintas Perangkat Daerah, Kompetensi SDM yang belum menyeluruh

1) Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Adanya Permasalahan – Permasalahan diatas, tidak berimplikasi langsung terhadap target Kinerja beberapa Program / Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026.

2) Kebijakan / tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

a. Mempercepat penyusunan Draft Regulasi untuk percepatan pelaksanaan kegiatan
b. Melaksanakan Forum Lintas Perangkat Daerah
c. Meningkatkan Kompetensi SDM baik melalui Pelatihan/Bimtek maupun Sosialisasi

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pencapaian Renstr-PD s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja- PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra- PD s/d tahun berjalan (2024)	
									Target Renja-PD Tahun (2023)	Realisasi Renja- PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
2	16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2	16	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	91,00	79,18	82,00	79,18	96,56	82,00	84,00	92,31

	16	1	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	105	12	21	21	100,00	21	54	51,43									
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	35	6	6	6	100,00	7	19	54,29									
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	70	12	10	10	100,00	14	36	51,43									
2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	10	2	3	3	100,00	3	8	80,00									
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan	4.920	984	912	899	98,57	984	2.867	58,27									
2	16	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	15	4	4	4	100,00	3	11	73,33									
2	16	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	20	4	4	4	100,00	4	12	60,00									

2	16	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	20	4	4	4	100,00	4	12	60,00
2	16	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	5	1	2	1	50,00	1	3	60,00
2	16	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	75	10	66	66	100,00	10	86	114,67
2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Layanan	25	5	5	5	100,00	5	15	60,00
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	2	2	100,00	1	4	80,00
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00

2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250	50	50	50	100,00	50	150	60,00
2	16	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	5	1	2	2	100,00	1	4	80,00
2	16	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2	16	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	1	6	6	100,00	100	107	107,00
2	16	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	125	25	93	93	100,00	100	218	218,00
2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	Bulan	60	12	3	3	100,00	12	27	45,00

						disediakan									
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	15	3	4	4	100,00	3	10	66,67
2	16	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	500	100	100	100	100,00	100	300	60,00
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	110	22	36	35	97,22	22	79	71,82
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1	3	3	100,00	1	5	100,00

2	16	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	60	15	147	147	100,00	15	177	295,00
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	Informasi dan Komunikasi Publik	4.200	840	840	840	100,00	840	2.520	60,00
2	16	2	02.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen	10	2	2	2	100,00	1	5	50,00
2	16	2	02.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	10	-	2	2	100,00	2	4	40,00

2	16	2	02.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas KomunikasiPemerintah Daerah	Dokumen	10	-	2	2	100,00	1	3	30,00
2	16	2	02.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	40	-	8	8	100,00	3	11	27,50
2	16	2	0,08402778	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	15	3	3	3	100,00	3	9	60,00
2	16	2	02.01	06	Pelayanan Informasi PubliK	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	25	5	5	5	100,00	5	15	60,00
2	16	2	0,08402778	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	310	41	250	250	100,00	3	294	94,84
2	16	2	02.01	08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	1.000	100	100	100	100,00	200	400	40,00

2	16	2	02.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
2	16	2	02.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	600	100	-	-	-	120	220	36,67
2	16	2	02.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00

2	16	2	02.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	30	6	6	6	100,00	6	18	60,00
2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	Persen	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2	16	3	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengelola e-government	OPD	58	30	58	58	100,00	58	58	100,00
2	16	3	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Smart City / Produk Hukum	Dokumen	30	3	6	6	100,00	-	9	30,00
2	16	3	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00

2	16	3	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	14	6	2	2	100,00	2	10	71,43
2	16	3	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	10	3	4	3	75,00	2	8	80,00
2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	46	6	16	16	100,00	3	25	54,35

2	16	3	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	90	6	66	60	90,91	6	72	80,00
2	16	3	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	5	1	2	2	100,00	1	4	80,00
2	16	3	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	Sistem Informasi	100	-	-	-	-	100	100	100,00
2	16	3	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	150	30	61	61	100,00	23	114	76,00
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		Nilai								
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	OPD	58	58	58	58	100,00	58	58	100,00

2	20	2	2.01	01	Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	6	2	2	2	100,00	1	5	83,33
2	20	2	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	680	116	135	135	100,00	130	381	56,03
2	20	2	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	5	1	2	2	100,00	1	4	80,00
2	20	2	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	348	116	116	116	100,00	116	348	100,00
2	20	2	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	50	18	18	18	100,00	-	36	72,00
2	20	2	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral Daerah yang dihimpun	Dokumen	6	1	2	2	100,00	1	4	66,67
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		Nilai								
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persen	100	-	-	-	-	18,97	18,97	100,00

2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	OPD	58	-	-	-	-	11	11	18,97
2	21	2	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	3	1	-	-	-	1	2	66,67
2	21	2	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
2	21	2	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00

2	21	2	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
2	21	2	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	Layanan JKS	5	-				1	1	20,00
2	21	2	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Layanan	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam menentukan skala penilaian kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berikut capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2023 berdasarkan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK		Target Renstra - PD			Realisasi	Capai an	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks SPBE			3,00	3,10	3,15	3,20	1,94	2,54	3,15	3,20	Capaian Kinerja pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022
2	Indeks Domain Tata Kelola SPBE			3,10	3,15	3,20	3,22	1,50	1,40	3,20	3,22	Capaian Kinerja pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022
3	Indeks Domain Layanan SPBE			2,96	3,01	3,06	3,11	2,71	3,51	3,06	3,11	Capaian Kinerja pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022

4	Indeks Domain Manajemen SPBE			3,25	3,30	3,35	3,40	1,00	1,00	3,35	3,40	Capaian Kinerja pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari

												tahun 2022
5	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE			3,05	3,10	3,15	3,20	1,30	3,30	3,15	3,20	Capaian Kinerja pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			82,00	84,00	86,00	88,00	93,95	-	86,00	88,00	Capaian Kinerja pada tahun 2022 melebihi dari target kinerja sedangkan tahun 2023 nilainya belum keluar
7	Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	Capaian sesuai dengan target kinerja
8	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	Capaian sesuai dengan target kinerja
9	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	Capaian sesuai dengan target kinerja
10	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi			10,00	18,97	37,93	56,89	18,97	-	37,93	56,89	Capaian sesuai dengan target kinerja

11	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21	21	21	21	21	-	21	21	Capaian sesuai dengan target kinerja

12	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			2	2	2	2	2	-	2	2	Capaian sesuai dengan target kinerja
13	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			4	4	4	4	4	-	4	4	Capaian sesuai dengan target kinerja
14	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			1	1	1	1	1	-	1	1	Capaian sesuai dengan target kinerja
15	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah			5	5	5	5	5	-	5	5	Capaian sesuai dengan target kinerja
16	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah			100	100	100	100	100	-	100	100	Capaian sesuai dengan target kinerja
17	Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			12	12	12	12	12	-	12	12	Capaian sesuai dengan target kinerja
18	Jumlah Barang Milik Daerah			100	100	100	100	100	-	100	100	Capaian sesuai dengan target kinerja
19	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola			840	840	840	840	840	-	840	840	Capaian sesuai dengan target kinerja
20	Jumlah OPD yang mengelola e-government			58	58	58	58	58	-	58	58	Capaian sesuai dengan target kinerja

21	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola			100	100	100	100	100	-	100	100	Capaian sesuai dengan target kinerja
22	Jumlah OPD yang menyelenggarakan			58	58	58	58	58	-	58	58	Capaian sesuai dengan target

	Satu Data Indonesia											kinerja
23	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah			11	11	11	11	11	-	11	11	Capaian sesuai dengan target kinerja
24	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah			1	1	1	1	11	-	1	1	Capaian sesuai dengan target kinerja
			1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		100,00	100,00	100,00	100,00	96,61	100,00	100,00	Persentase Capaian Kinerja sudah cukup baik
			2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		73,00	75,00	85,00	73,91	87,50	75,00	85,00	Persentase Capaian Kinerja sudah cukup baik
			3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota		70,43	71,22	71,91	70,43	69,37	71,22	71,91	Persentase Capaian Kinerja sudah cukup baik

			4. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Capaian Kinerja sesuai dengan target kinerja
			5. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Capaian Kinerja sesuai dengan target kinerja
			6. Tingkat keamanan informasi pemerintah		55,60	57,80	58,00	55,60	54,88	57,80	58,00	Persentase Capaian Kinerja sudah cukup baik

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (RPJMD) 2021-2026 menjadi acuan dalam pelaksanaa pembangunan Sumber Daya Manusia. Masalah utama dalam Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

a) Urusan Kabupaten Kutai Kartanegara *Smart City*.

Secara garis besar pengembangan *Smart City* di Kabupaten Kutai Kartanegara di era sekarang ini sangat diperlukan guna pengembangan teknologi informasi dan komunikasi berkaitan dengan pengembangan kota cerdas di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dirancangguna membantu berbagai hal kegiatan mesayarakat, terutama dalam upaya pengelolaan Sumber Daya yang ada dengan efisien, serta memberikan kemudahan mengakses dan mendapatkan informasi. Pengembangan aplikasi yang ada pada setiap SKPD untuk dapat mengintgrasikan data layanan informasi.

b) Satu Data Layanan untuk Pembangunan Kutai Kartanegara

Data yang digunakan oleh aplikasi yang saat sekarang dikembangkan di beberapa SKPD belum memiliki keseragaman struktur dikarenakan belum adanya standar baku yag dapat dijadikan sebagai dasar bagi SKPD dalam membangun/mengembangkan aplikasi yang sesui kebutuhan masing masing SKPD.

Kondisi ini menjadikan satu kendala tersendiri dalam proses integrasi data. Untuk itu pemerintah harus memiliki standar baku yang disepakati bersama yang dapat dijadikan patokan dalam setiap pembuatan/pengembangan aplikasi disetiap SKPD.

Integrasi data merupaka sebuah proses menggabungkan atau menyatukan data yang berasal dari berbagai sumber dalam rangka mendukung management Informasi dan mendukung penggunaan untuk melihat kesatuan data.

Integrasi data mengharuskan semua komponen menggunakan

sumber data yang sama yang sudah terferifikasi oleh instansi terkait dan menghindari terjadinya duplikasi atau adanya data ganda.

c) Layanan pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau Layanan Online

Pemanfaatan teknologi saat ini merupakan sau hal yang tidak dapat dihindarkan, karena kebutuhan informasi yang sangat cepat dan tepat menjadi suatu kebutuhan utama disegala aspek.

Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk mentrasformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebi baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat melelui berbagai aplikasi yang bersifat On-Line.

d) Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi

Informasi adalah keterangan, ernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makana dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dengan format sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara elektronik maupun non elektronik. Setiap informasi publik bersifat terbuka yang dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, program dan proses serta alasan pembuatan kebijakan publik. Mendorong dan meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik yang baik, seperti yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Mewujudkan penyelengaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipetanggung jawabkan.

e) Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tingginya kebutuhan informasi yang ingin didapatkan oleh masyarakat dewasa ini, dengan difasilitasi oleh kecanggihan teknologi, alat komunikasi, kemudahan hakses internet melalui jaringan free WiFi dan jaringan 4G, alat tekhnologi penunjang kemudahan transaksi dan kemampuan bertukar data digital secara jarak jauh melaui internet menjadi salah satu ciri bahwa masyarakat kita sedang memasuki tahap sebagai masyarakat informasi. Ini adalah salahsatu bukti tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi

Permasalahan dan Hambatan yang dhadapi Dinas komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara antara lain :

a. Kurangnya Sumber Daya Spesifik IT (*Programmer, Enginer Network / Hardware / System, Quality Control*)
b. Kondisi Infrastruktur IT yang sebagian besar sudah berumur diatas umur Teknis (10-15 tahun)
c. Belum optimalnya Sistem Keamanan Informasi
d. Belum Terstandarisasinya Perangkat Lunak dan Terintegrasinya Aplikasi (Sistem dan Database)
e. Belum optimalnya Fungsi Wali Data (Informasi Satu Data)
f. Belum optimalnya fungsi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik secara komperhensif

3. Dampak Terhadap PencapaianVisi dan Misi Kepala Daerah, Capaian Program Nasional/ Internasional, SPM dan MDGs.

Tabel 2.3

FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA
TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
-1	-2	-3	-4	-5
	MISI 1 : Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efisien Efektif, dan Melayani;			

1	Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA)	1. Masih terdapat desa Blankspot diakibatkan dari tidak meratanya pemabngunan infrastruktur jaringan 2. Belum terintegrasinya aplikasi yang ada di Perangkat Daerah 3. Masih kurangnya SDM khususnya di Bidang IT 4. Masih belum maksimalnya pemanfaatan Sistem Informasi yang ada di Kecamatan, Desa dan Kelurahan 5. Belum tersedianyan rancangan masterplan pelaksanaan pelayanan pemerintahan berbasis digital untuk mendukung pelaksanaan RPJMD 2021 - 2026	1. Tidak meratanya pembangunan menara telekomunikasi oleh stakeholder terkait di Bidang Telekomunikasi. 2. 23 desa masih berstatus blankspot. 3. Masih kurangnya koordinasi yang intensif dengan stakeholder terkait di Bidang Telekomunikasi 4. Masih kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan Sistem Informasi	1. Terdapat 21 menara telekomunikasi/tower milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Telah terbangun 277menara telekomunikasi/tower milik provider yang tersebar di 18 Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara . 3. Telah terhubung jaringan internet di 216 desa/kelurahan dari237 desa/kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
	MISI 4 : Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah			

1	Program Pemantapan Konektivitas Wilayah	Masih terdapat desa Blankspot diakibatkan dari tidak meratanya pemabnguna n infrastruktur jaringan	1. Tidak meratanya pembangunan menara telekomunikasi oleh stakeholder terkait di Bidang Telekomunikas i. 2. 23 desa masih berstatus blankspot. 3. Masih kurangnya koordinasi yang intensif dengan stakeholder terkait di Bidang Telekomunikas i	1. Terdapat 21 menara telekomunika si/tower milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Telah terbangun 277 menara telekomunika si/tower milik provider yang tersebar di 18 Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara . 3. Telah terhubung jaringan internet di 216 desa/kelurahan dari 237 desa/kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.

   Adapun Tantangan dalam Meningkatkan Pelayanan Diskominfo Kab. Kutai Kartanegara antara lain :

- Pesatnya kemajuan dalam bidang TIK tidak dapat diimbangi dengan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang mempuni, sehingga pelayanan informasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara, dan masyarakat kurang optimal;
- Minimnya sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menunjang kinerja birokrasi yang cepat, tepat dan berdaya guna.
- Belum Optimalnya Fungsi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik secara komperhensif
- Belum optimalnya pendataan Statistik Sektoral

   Adapun Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dsikominfo Kab. Kutai Kartanegara antara lain :

- Adanya peluang recruitment SDM IT
- Adanya peluang peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi
- Adanya peluang optimalisasi Fungsi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik secara komperhensif
- Perlu adanya pendataan Statistik Sektoral secara komperhensif

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

   Dari penjabaran isu-isu penting diatas dapat di rekomendasikan hal – hal sebagai berikut:

- Perlunya Recruitment Sumber Daya Spesifik IT
- Revitalisasi Infrastruktur dan Perangkat Keras IT serta penerapan Pengamanan Sistem Informasi
- Membuat Regulasi tentang Standarisasi Perangkat Lunak dan Keras serta Perlakuan Integrasi Sistem dan Database
- Membangun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik secara Komperhensif

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara pada Tahun 2025

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara tahun 2025 pada tabel dibawah ini :

TABEL T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat

N	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88,00 Nilai	15.984.481.540	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88,00 Nilai	16.426.464.836	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Dokumen	200.000.000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.000.000.000	

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	450.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50.000.000	

						PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	*KAB. KUTAI KARTANEGARA,*	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000
						PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	*KAB. KUTAI KARTANEGARA,*	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	250.000.000

						PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	*KAB. KUTAI KARTANEGARA,*	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*KAB. KUTAI KARTANEGARA,*	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	150.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	2 Laporan	11.006.217.716	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	2 Laporan	10.658.201.012
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	984 Orang/Bula n	10.694.925.552	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	888 Orang/Bula n	10.296.908.848
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	4 Laporan	311.292.164	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	4 Laporan	311.292.164

			Semesteran SKPD					Semesteran SKPD		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	4 Dokumen	125.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	4 Dokumen	105.000.000
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	125.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	30.000.000
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000

						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	150.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	150.000.000	
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	150.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	150.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah	5 Layanan	470.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah	5 Layanan	480.000.000	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	

10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Luar Daerah,	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	200.000.000	
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	70.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	70.000.000	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	450.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	450.000.000	
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	250.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	250.000.000	

12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	200.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	200.000.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.001.463.824	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.001.463.824	
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.100.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.100.000	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	742.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	742.000.000	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2.254.363.824	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2.254.363.824	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		Jumlah Barang Milik Daerah	100 Unit	581.800.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		Jumlah Barang Milik Daerah	100 Unit	581.800.000	

	Urusan Pemerintahan Daerah					Urusan Pemerintahan Daerah					
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	131.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	131.800.000	
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	

Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD	Hasil Analisi Kebutuhan

18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	15 Unit	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	15 Unit	300.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	100 Persen	2.605.357.333	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	100 Persen	15.690.020.000	

	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	840 Informasi dan Komunikasi Publik	2.605.357.333	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	840 Informasi dan Komunikasi Publik	15.690.020.000	
19	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	75.000.000	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Tenggarong	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	2 Persen	75.000.000	
20	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2 Dokumen	200.000.000	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Tenggarong	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	11 Rekomendasi	1.160.000.000	1. Perlunya Tenaga Teknis untuk mengelola Call Center 112, Sewa Aplikasi dan Sosialisasi Call Center 2. Kurangnya peralatan pendukung seperti handy talky untuk optimalisasi petugas call center 112 di lapangan 3. Kebutuha

											n analisis terhadap isu - isu terkini yang berkembang di media online untuk ditindaklanjuti
21	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas KomunikasiPemerintah Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Diseminasi Informasi	Tenggarong	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	2 Persen	100.000.000	
22	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tenggarong, Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	3 Dokumen	300.000.000	Penyusunan Konten	Kukar	Jumlah Konten Informasi Publik	850 Konten	300.000.000	

23	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3 Dokumen	200.000.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tenggarong	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 Media	12.045.000.000	1. Kurangnya peralatan untuk liputan kepala daerah dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 2. Pengadaan Tenaga Ahli Desain Grafis, Videografer 3. Perlunya Perjalanan dinas untuk peliputan kegiatan seluruh Perangkat Daerah 4. Pentingnya dukungan kendaraan operasional untuk pelaksanaan peliputan di lapangan 5. Kerjasama Media 6. Dukungan Program Stunting
24	Pelayanan Informasi PubliK	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	5 Dokumen	500.000.000	Pelayanan Informasi PubliK	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5 Permohonan	300.000.000	

25	Layanan Hubungan Media	Tenggarong, Samarinda	Jumlah Layanan Hubungan Media	5 Layanan	530.357.333	Relasi Media	Tenggarong, Samarinda	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	5 laporan	200.000.000	
26	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Tenggarong, Ma Badak, Ma Muntai, Loa Janan, Kota Bangun	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	200 Dokumen	300.000.000	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kukar	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	50 Komunitas	1.000.000.000	1. Permohonan dari KIM dan usulan Musrenbang 2. Mendorong dan memberikan motivasi kepada KIM dalam diseminasi informasi dan komunikasi publik
27	Manajemen Komunikasi Krisis	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Tenggarong	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1 Dokumen	160.020.000	1. Pelaksanaan Tupoksi IKP 2. Baju Kemeja untuk Admin/Pengelola SP4N LAPOR pada OPD

28	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Tenggarong, Ma. Badak, Ma. Kaman	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	6 Dokumen	300.000.000	-	-	-	-	-	
29	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata KelolaKomisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	100.000.000	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Tenggarong	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	100.000.000	
30						Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Tenggarong	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	16 Orang	250.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI		Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	100 Persen	12.033.827.670	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI		Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	100 Persen	21.230.787.670	

	INFORMATIKA					INFORMATIKA					
	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	100 Sistem Informasi	7.902.860.670	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	100 Sistem Informasi	-	
31	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	23 Unit	7.902.860.670	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang mengelola e-government	58 OPD	4.130.967.000	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang mengelola e- government	58 OPD	21.230.787.670	

32	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Tenggarong	Jumlah Dokumen Smart City / Produk Hukum	3 Dokumen	500.000.000	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	2 Dokumen	300.000.000	

33	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Tenggarong	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1.640.688.158	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	59 Perangkat Daerah	12.793.508.828	Program Dedikasi Kukar Idaman Program Pemantapan Konektivitas Wilayah 1. Penyediaan Jaringan Telekomunikasi untuk desa blankspot 2. Menyediakan jaringan internet di Digital University 3. Penyediaan Jaringan Internet untuk desa yang lemah sinyal melalui Radio Link atau Broadband
34	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tenggarong	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	175.000.000	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Tenggarong	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	1Aplikasi	100.000.000	

35						Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Tenggarong, Jakarta	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	2 Layanan	75.000.000	
36	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jakarta, Tenggarong	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	2 Dokumen	200.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Tenggarong, Jakarta	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	59 Unit	250.000.000	

37	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Desa Lamin Telihan, Desa Sepatin, Menaman g Kiri	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3 Dokume n	1.265.278.84 2	-	-	-	-	-	
38	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Yogyakarta	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	6 Dokume n	100.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Luar Daerah,	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	6 Dokumen	100.000.000	
39	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Samarinda, Tenggarong	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraa n SPBE	1 Dokume n	250.000.000	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Samarinda , Tenggaron g	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	150.000.000	Program Dedikasi Kukar Idaman Program DISAPA
40						Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Tenggarong , Jakarta, Yogyakarta	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	400.000.000	Peningkatan indeks SPBE pada Domain Manajemen SPBE berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi SPBE 2023

						Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	59 Perangkat Daerah	7.062.278.842	1. Meningkatkan keamanan jaringan 2. Menghindari Serangan Cyber di Pusat Data 3. Memfilter lalulintas jaringan dan memblokir data yang mencurigakan/berbahaya
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				1.450.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				5.050.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	100 Persen	1.450.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	100 Persen	5.050.000.000	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	58 OPD	1.450.000.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	58 OPD	5.050.000.000	

41	Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data	1 Dokumen	750.000.000	Peningkatan Peran Statistik Sektoral Terhadap Sistem Statistik Nasional	Luar Daerah, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik untuk Perencanaan,	100 Persen	1.300.000.000	1. Roadmap / Rencana Aksi Penyelenggaraan Statistik Sektoral diperlukan untuk mendukung Indeks Domain

			Statistik Sektoral					Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan			Manajemen SPBE 2. Tindak Lanjut hasil Evaluasi Penyelenggaran Statistik Sektoral Kabupaten Kutai Kartanegara 3. Mendukung Indeks Reformasi Birokrasi terkait Tingkat Kematangan Pembangunan Statistik Sektoral
42	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Yogyakarta, Samarinda	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	130 Orang	250.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Luar Daerah, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	130 Orang	200.000.000	

43	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tenggarong	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yangDihimpun	1 Dokumen	450.000.000	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Tenggarong	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang Rilis Tepat Waktu	100 Persen	3.250.000.000	1. Notebook/Laptop Tenaga Ahli untuk pengelola Portal Satu Data dan Geospasial Kabupaten Kutai Kartanegara serta mendukung Penguatan Data Kecamatan dan Program Desa Presisi2. Penyusunan Doklumen Indeks Harga Pasar Kabupaten Kutai Kartanegara yang rilis setiap Bulan selama 12 Bulan dengan lokasi pencacahan di Kecamatan Tenggarong dan kecamatan Loa Janan3. Pelaksanaan kegiatan survei biaya hidup dengan bekerja sama dengan BPS Kab. Kukar selama 12 bulan yang hasilnya

											akan digunakan sebagai dasar penetapan harga dasar komoditas perhitungan indeks harga pasar yang selama ini belum pernah dilakukan dan hanya menggunakan data dari provinsi dan data sister city
44						Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah kegiatan statistik yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	200.000.000	

45						Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Tenggarong	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari pembina Data	1 Dokumen	100.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				700.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				700.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi	18,97 Persen	700.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi	18,97 Persen	700.000.000	
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	11 OPD	500.000.000	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	11 OPD	500.000.000	
46	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Yogyakarta	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah	1 Laporan	150.000.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Yogyakarta	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah	2 Laporan	150.000.000	

			Daerah Kabupaten/Kota					Daerah Kabupaten/Kota			
47	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	200.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	200.000.000	
48	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Perangkat Daerah	150.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Perangkat Daerah	150.000.000	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota		Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	1 Layanan JKS	200.000.000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota		Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	1 Layanan JKS	200.000.000	

49	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	200.000.000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	200.000.000	
	Total				32.773.666.543					59.097.272.506	

2.5 Penelaahan Program Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Untuk tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara belum ada usulan dari Pemangku Kepentingan.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Desa Lebak Mantan	Jumlah Tower Repeater	1 Unit	Akan dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan
2	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Desa Kupang Baru	Jumlah Tower Repeater	1 Unit	Akan dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan
3	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Desa Sebemban	Jumlah Tower Repeater	1 Unit	Akan dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan
4	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Desa Enggelam	Jumlah Tower Repeater	1 Unit	Akan dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan
5	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Desa Liang Buaya	Jumlah Tower Repeater	1 Unit	Akan dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan
6	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Desa Sedulang	Jumlah Tower Repeater	1 Unit	Akan dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan
7	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Desa Muai	Jumlah Tower Repeater	1 Unit	Akan dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan

8	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Desa Buana Jaya	Jumlah Tower Repeater	1 Unit	Akan dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan
9	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Desa Liang Buaya	Jumlah Tower Repeater	1 Unit	Akan dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan
10	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Desa Loa Duri Ulu	Jumlah Tower Repeater	1 Unit	Akan dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan
11	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Desa Loa Duri Ulu	Jumlah Tower Repeater	1 Unit	Akan dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan
12	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Desa Jantur Selatan	Jumlah Tower Repeater	1 Unit	Akan dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan
13	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Desa Salo Palai	Jumlah Sarana Prasarana	1 Paket	Catatan penambahan anggaran untuk memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana
14	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Desa Sebemban	Jumlah Aplikasi/Website	1 Unit	Silahkan berkoordinasi lebih lanjut untuk pembuatan website desa
15	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Desa Makarti	Jumlah Aplikasi/Website	1 Unit	Silahkan berkoordinasi lebih lanjut untuk pembuatan website desa

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan umum nasional bidang komunikasi dan informatika sebagaimana tertuang dalam dokumen Rensta Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2020 - 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1.	Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik	Renstra Kemkominfo Tahun 2020 - 2024	
2.	Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan	Renstra Kemkominfo Tahun 2020 - 2024	
3.	Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital	Renstra Kemkominfo Tahun 2020 - 2024	
4.	Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan	Renstra Kemkominfo Tahun 2020 - 2024	
5.	Mempercepat penyelesaian legislasi primer	Renstra Kemkominfo Tahun 2020 - 2024	
6.	Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah	Renstra Kemkominfo Tahun 2020 - 2024	
7.	Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal	Renstra Kemkominfo Tahun 2020 - 2024	

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara menyesuaikan atau mensinkronisasi dalam berbagai kebijakan strategis yaitu melalui Program :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara..

3.2.1 Tujuan Renja Perangkat Daerah

Tujuan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah ”Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”.

3.2.2 Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE
2. Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE
3. Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE
4. Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

a) Faktor –faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 adalah Visi Bupati Kutai Kartanegara “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

Untuk mencapai Visi tersebut maka dilakukan berbagai upaya strategis, salah satu upaya itu dituangkan dalam Sasaran RPJMD Kabupaten kutai Kartanegara. Dalam Sasaran RPJMD, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 1 Tujuan dan 4 Sasaran yang sudah ditetapkan melalui turunan Sasaran RPJMD Kabupaten antara lain :

Tujuan :

”Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”.

Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE
2. Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE
3. Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE
4. Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE

b) Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Jumlah Progam yang direncanakan pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 Program, yang terdiri dari 1 (satu) Program Rutin dan 4 (empat) Program Urusan Pemerintahan.

Rincian Program sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Dari 5 (lima) Program diatas, dijabarkanlah ke dalam bentuk Kegiatan dan Sub Kegiatan. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dllaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara sebanyak 13 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan. Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut disusun sesuai dengan indikator kinerja, target, lokasi, sasaran dan kebutuhan dana (pagu indikatif).

Kebutuhan dana pagu dari seluruh Program / Kegiatan tersebut pada tahun 2025 sebesar Rp. 59.097.272.506,- *(Lima puluh sembilan milyar sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam rupiah)*

c) Rumusan Program dan Kegiatan memiliki beberapa sub kegiatan yang tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD dikarenakan beberapa hal antara lain:

a. Adanya Penyesuaian Output Indikator Sub Kegiatan
b. Adanya perubahan subkegiatan yang ada di SIPD
c. Adanya pemetaan subkegiatan yang baru dari subkegiatan lama yang ada di Renstra dengan subkegiatan baru yang ada di SIPD
d. Adanya tambahan subkegiatan baru menyesuiakan dengan analisis kebutuhan dan paket pekerjaan

d) Tabel Rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut :

TC 33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050- 5889	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE		3,22 Nilai				3,29 Nilai	
	Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE		3,11 Nilai				3,16 Nilai	
	Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE		3,40 Nilai				3,45 Nilai	
	Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE	Indeks Domain Manajemen SPBE		3,20 Nilai				3,25 Nilai	
	Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE		3,14 Nilai				3,25 Nilai	
xxx	[URUSAN] X NON URUSAN								
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		84,00 Nilai	16.426.464.836			84,00 Nilai	15.984.481.540
2.16.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		10 Dokumen	1.000.000.000			18 Dokumen	200.000.000

		Perangkat Daerah							
2.16.01.2.01.0008	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong	1 Dokumen	50.000.000	APBD		-	-
2.16.01.2.01.0009	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Tenggarong	1 Data	250.000.000	APBD		-	-
2.16.01.2.01.0010	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	1 Berita Acara	50.000.000	APBD		-	-
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	3 Dokumen	450.000.000	APBD		3 Dokumen	100.000.000
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	3 Laporan	50.000.000	APBD		3 Laporan	100.000.000

2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	4 Laporan	150.000.000	APBD		-	-
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		2 Laporan	10.658.201.012			2 Laporan	11.006.217.716
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	888 Orang/bulan	10.296.908.848	APBD		888 Orang/bulan	10.694.925.552
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong	1 Laporan	25.000.000	APBD		-	-
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	4 Laporan	311.292.164	APBD		4 Laporan	311.292.164
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong	1 Dokumen	25.000.000	APBD		-	-
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		4 Dokumen	105.000.000			4 Dokumen	125.000.000
2.16.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	1 Dokumen	25.000.000	APBD		-	-

2.16.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	1 Laporan	50.000.000	APBD		-	-
2.16.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	2 Laporan	30.000.000	APBD		2 Laporan	125.000.000
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	150.000.000			1 Dokumen	150.000.000
X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kutai Kartanegara	10 Orang	150.000.000	APBD		10 Orang	150.000.000
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah		5 Layanan	480.000.000			5 Layanan	470.000.000
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tenggarong	1 Paket	10.000.000	APBD		-	-
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tenggarong	1 Paket	100.000.000	APBD		1 Paket	100.000.000
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tenggarong	1 Paket	50.000.000	APBD		1 Paket	50.000.000
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jakarta, Sem	1 Paket	50.000.000	APBD		1 Paket	50.000.000

			ua Kecamatan						
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	50 Laporan	200.000.000	APBD		50 Laporan	200.000.000
2.16.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	1 Dokumen	70.000.000			1 Dokumen	70.000.000
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		100 Persen	450.000.000			100 Persen	450.000.000
2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tenggarong	1 Unit	250.000.000	APBD		1 Unit	250.000.000
2.16.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tenggarong	15 Unit	200.000.000	APBD		15 Unit	200.000.000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 Bulan	3.001.463.824			12 Bulan	3.001.463.824
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	1 Laporan	5.100.000	APBD		1 Laporan	5.100.000
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tenggarong	1 Laporan	742.000.000	APBD		1 Laporan	742.000.000
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	3 Laporan	2.254.363.824	APBD		3 Laporan	2.254.363.824

		yang Disediakan							
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah		100 Unit	581.800.000			100 Unit	581.800.000
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tenggarong	22 Unit	131.800.000	APBD		22 Unit	131.800.000
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tenggarong	1 Unit	150.000.000	APBD		1 Unit	150.000.000
2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tenggarong	15 Unit	300.000.000	APBD		15 Unit	300.000.000
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik		100 Persen	15.690.020.000			100 Persen	2.605.357.333
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola		840 Informasi dan Komunikasi Publik	15.690.020.000			840 Informasi dan Komunikasi Publik	2.605.357.333

2.16.02.2.01.0014	RELASI MEDIA	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Tenggarong, Samarinda	5 Laporan	200.000.000	APBD		5 Laporan	200.000.000
2.16.02.2.01.0015	KEMITRAAN KOMUNIKASI DENGAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kab. Kutai Kartanegara	50 Komunitas	1.000.000.000	APBD		50 Komunitas	300.000.000
2.16.02.2.01.0016	DUKUNGAN ADMINISTRATIF, KEUANGAN, DAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Tenggarong	1 Laporan	100.000.000	APBD		1 Laporan	100.000.000
2.16.02.2.01.0017	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kab. Kutai Kartanegara	5 Permohonan	300.000.000	APBD		5 Permohonan	500.000.000

2.16.02.2.01.0018	SOSIALISASI PERATURAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Tenggarong	2 Persentase	75.000.000	APBD		1 Persen	75.000.000
2.16.02.2.01.0019	MONITORING INFORMASI KEBIJAKAN, OPINI, DAN ASPIRASI PUBLIK	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Tenggarong	11 Rekomendasi	1.160.000.000	APBD		12 Rekomendasi	200.000.000
2.16.02.2.01.0020	DISEMINASI INFORMASI	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Tenggarong	2 Persentase	100.000.000	APBD		2 Persentase	100.000.000
2.16.02.2.01.0021	PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Tenggarong	5 Media	12.045.000.000	APBD		5 Media	530.357.333
2.16.02.2.01.0022	PENYUSUNAN STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Tenggarong	1 Dokumen	160.020.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
2.16.02.2.01.0023	PENYUSUNAN KONTEN	Jumlah Konten Informasi Publik	Kukar	850 Konten	300.000.000	APBD		850 Konten	300.000.000
2.16.02.2.01.0024	PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Tenggarong	16 Orang	250.000.000			16 Orang	250.000.000
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN	Cakupan Aplikasi yang dikelola		100 Persen				100 Persen	

	APLIKASI INFORMATIKA	OPD			21.230.787.670				12.033.827.670
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD		58 OPD	21.230.787.670			58 OPD	12.033.827.670
2.16.03.2.02.0015	FASILITASI PENYELENGGARAAN SPBE DI LINGKUNGAN PEMDA	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Samarinda, Tenggarong	1 Laporan	150.000.000		Program Dedikasi Kukar Idaman 1. Program DISAPA	1 Laporan	150.000.000

2.16.03.2.02.0018	KOORDINASI PENYUSUNAN DAN/ATAU REVIU ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE PEMERINTAH DAERAH	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Tenggarong	2 Dokumen	300.000.000	APBD		2 Dokumen	300.000.000
2.16.03.2.02.0019	KOORDINASI PELAKSANAAN MANAJEMEN SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Tenggarong, Jakarta, Yogyakarta	1 Dokumen	400.000.000			1 Dokumen	100.000.000
2.16.03.2.02.0020	PEMBANGUNAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN APLIKASI KHUSUS YANG SESUAI DENGAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE PEMERINTAH DAERAH	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Tenggarong	1 Aplikasi	100.000.000	APBD		1Aplikasi	100.000.000
2.16.03.2.02.0023	KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN KABUPATEN ATAU KOTA CERDAS	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Tenggarong, Jakarta	59 unit	250.000.000	APBD		59 Unit	400.000.000
2.16.03.2.02	PENYELENGGARAAN	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota	-	59		APBD		59	

.0024	JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		Perangkat Daerah	7.062.278.842			Perangkat Daerah	4.487.278.842
2.16.03.2.02.0025	KOORDINASI PEMANFAATAN PORTAL PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH YANG TERINTEGRASI	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Tenggarong, Jakarta	2 Layanan	75.000.000	APBD		2 Layanan	75.000.000
2.16.03.2.02.0028	KOORDINASI DAN FASILITASI PROMOSI LITERASI SPBEDAN/ATAU KOLABORASI PENYELENGGARAAN SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Luar Daerah,	6 Dokumen	100.000.000	APBD		6 Dokumen	100.000.000
2.16.03.2.02.0030	PENYEDIAAN AKSES INTERNET UNTUK PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Kab. Kutai Kartanegara	59 Perangkat Daerah	12.793.508.828	APBD	Program Dedikasi Kukar Idaman 17. Program Pemantapan	59 Perangkat Daerah	6.321.548.828

	SPBE						Konektivitas Wilayah		
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				5.050.000.000				1.450.000.000
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia		100 Persen	5.050.000.000			100 Persen	1.450.000.000
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia		58 OPD	5.050.000.000			58 OPD	1.450.000.000
2.20.02.2.01.0007	PENGINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Luar Daerah, Kab. Kutai Kartanegara	130 Orang	200.000.000	APBD		130 Orang	200.000.000
2.20.02.2.01.0008	PENINGKATAN PERAN STATISTIK SEKTORAL TERHADAP SISTEM STATISTIK NASIONAL	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan	Luar Daerah, Kab. Kutai Kartanegara	100 Persentase	1.300.000.000	APBD		100 Persen	750.000.000

		Kebijakan							
2.20.02.2.01.0009	PENINGKATAN KUALITAS DATA STATISTIK SEKTORAL	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Tenggarong	100 Persentase	3.250.000.000	APBD		100 Persen	200.000.000
2.20.02.2.01.0010	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	200.000.000	APBD		1 Dokumen	200.000.000
2.20.02.2.01.0011	PELAKSANAAN PROSES BISNIS STATISTIK SEKTORAL SESUAI STANDAR	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Tenggarong	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				700.000.000				850.000.000
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi		18,97 Persen	700.000.000			18,97 Persen	850.000.000
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk		11 OPD	500.000.000			11 OPD	650.000.000

	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	pengamanan informasi Pemerintah Daerah							
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	2 Laporan	150.000.000	APBD	-	2 Laporan	150.000.000
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	2 Laporan	200.000.000	APBD		2 Laporan	200.000.000
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Tenggarong	1 Perangkat Daerah	150.000.000	APBD		1 Perangkat Daerah	150.000.000
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Tenggarong	-	-	APBD		1 Dokumen	150.000.000

2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah		1 Layanan JKS	200.000.000			1 Layanan JKS	200.000.000
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Tenggarong	1 Perangkat Daerah	200.000.000	APBD		1 Perangkat Daerah	200.000.000
TOTAL					59.097.272.506	-			32.923.666.543

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2025 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025, serta merupakan kesinambungan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.1. Catatan Penting

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada tahun 2025. Yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika. Sedangkan apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai KartanegaraTahun 2021-2026.

4.2. Kaidah - kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD, RencanaKerja (Renja) PD, RencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan didukung oleh seluruh *stakeholders* termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
4. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Pokok dan Unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaannya;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJMD, Pelaksanaan RPJMD, Pengawasan pelaksanaan RPJMD, serta evaluasi pelaksanaan RPJMD;

6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
7. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dilakukan pada tahun kedua dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indicator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indicator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara secara sendiri (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka *clean government* and *good governance* (Dunia Usaha, Masyarakat dan Pemerintahan).

4.3. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 berlaku sejak tanggal di tetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

v.RENJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagai yang telah ditetapkandalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk Periode 1 (satu) Tahun, yang memuat kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi Masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagai yang telah ditetapkandalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk Periode 1 (satu) Tahun, yang memuat kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi Masyarakat. Penyusunan Rancangan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 berdasarkan pada aturan- aturan sebagai berikut :

1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8 Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9 Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

13 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

15 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah dokumen perencanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran,pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dilingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Tujuan :

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bertujuan:

a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025;
b. Menyediakan sarana pengendalian program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2025;
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya Rencana Kerja (RENJA), maksuddan tujuan, landasan hukum, hubungan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, danuraian singkat tentang sistematika penyusunan Rencana Kerja (RENJA).

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Program dan Kegiatan
BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) suatu Perangkat Daerah adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan program atau kegiatan-kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang sah untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tingkat Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 sebesar 108,00% (sangat tinggi) sedangkan target Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 sebesar Rp41.270.320.028,00- dan Realisasinya sebesar Rp37.823.726.171,00- atau sebesar 91,65 % (sangat tinggi), serta diproyeksi untuk realisasi capaian kinerja dan anggaran pada tahun 2024 dapat terealisasi optimal.

Realisasi target capaian urusan Kearsipan tentang sasaran Renstra ’Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional dengan indikator ‘Tingkat ketersediaan arsip’ dapat tercapai karena

didukung data dan informasi dalam menentukan target yang menyesuaikan dengan metode penilaian Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) dan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) serta sedangkan Urusan Perpustakaan target sasaran Renstra Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat dengan indikator 'Indeks Pembangunan Literasi masyarakat' telah mencapai target, sehingga diharapkan peningkatan pembangunan gedung perpustakaan desa dan sarana prasarana perpustakaan sehingga pengunjung dapat lebih meningkat di Tahun 2024.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program/kegiatan/subkegiatan yang realisasinya memenuhi target kinerja hasil/keluaran karena telah sesuai yang direncanakan;
2. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja progam/kegiatan adalah kerjasama, koordinasi dan konsolidasi antara semua pemangku kepentingan;
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yakni capaian indikator program kearsipan prosentase SKPD tentang tata kelola arsip perangkat daerah 88,24% dan Indeks Pembangunan Literasi masyarakat sebesar 101,68%;
4. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran sub kegiatan yang perlu diambil untuk mempertahankan hasil capaian adalah perlu menjaga kerjasama yang baik serta selalu berkoordinasi dan berkonsolidasi berjenjang pada perangkat daerah.

Tabel TC.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra- PD s.d. Tahun 2023

Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra-PD s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja -PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
2:23:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74	*95.20*	71	*95.20*	134	72	*262.40*	354.59
2.23.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah*	*80*	*12*	*12*	*12*	100	*12*	*36*	45.00
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18	*3*	3	*3*	100	3	*9*	50.00

2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan DokumenRKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	*1*	1	*1*	100	1	*3*	50.00
2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	*0*	1	*1*	100	1	*2*	33.33

2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	*4*	4	*4*	100	4	*12*	50.00
2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	18	*3*	2	*2*	100	3	*8*	44.44
2.23.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yangakuntabel*	*30*	*5*	*5*	*5*	100	*5*	*15*	50.00
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN	*570*	*95*	*95*	*95*	100	*95*	*285*	50.00
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	*1*	1	*1*	100	1	*3*	50.00
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ SemesteranSKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	*3*	12	*12*	100	3	*18*	100.00
2.23.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan danAnalisis Prognosis Realisasi Anggaran	6	*1*	1	*1*	100	1	*3*	50.00

2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah*	*6*	*1*	*1*	*1*	100	*1*	*3*	50.00
2.23.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	*1*	1	*1*	100	1	*3*	50.00

2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	*10*	*1*	*1*	*1*	100	*1*	*3*	30.00
2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	650	*130*	130	*130*	100	0	*260*	40.00
2.23.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-UndanganJumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-UndanganJumlah Inovasi	52	*1*	*600*	*600*	100	*12*	*613*	1178.85
2.24.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelaatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	0	*0*	*30*	*30*	100	*0*	*0*	0.00
2.23.01.	*Administrasi Umum Perangkat*	*Jumlah layanan*	*40*	*8*	8	*8*	100	8	*24*	60.00

2.06	*Daerah*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*								
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	90	*15*	17	*17*	100	15	*47*	52.22
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	320	*91*	*60*	*60*	100	*60*	*211*	65.94
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	165	*24*	43	*43*	100	31	*98*	59.39
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	411960	*82390*	4	*4*	100	82390	*164784*	40.00
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	29900	*4000*	5580	*5580*	100	5580	*15160*	50.70

		Disediakan								

2.23.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yangDisediakan	6	*1*	8	*8*	100	1	*10*	166.67
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1224	*200*	200	*200*	100	200	*600*	49.02
2.23.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen PenatausahaanArsip Dinamis pada SKPD	9000	*1500*	1500	*1500*	100	1500	*4500*	50.00
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah yang disediakan*	60	*12*	12	*12*	100	12	*36*	60.00
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	720	*12*	12	*12*	100	120	*144*	20.00
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	*12*	12	*12*	100	12	*36*	50.00
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	*12*	12	*12*	100	12	*36*	50.00
2.23.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Barang Milik Daerah*	*1133*	*100*	*100*	*100*	100	*218*	*418*	36.89

2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	*4*	5	*5*	100	4	*13*	54.17
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	*6*	6	*6*	100	6	*18*	50.00

2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1060	*206*	296	*296*	100	206	*708*	66.79
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13	*3*	9	*9*	100	2	*14*	107.69
2:23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
2:23:02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	*46.98*	*26.29*	32.08	32.86	102	32.08	*91.23*	194.19
2.23.02.2.01	*Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase perpustakaan sesuaistandar nasional perpustakaan*	2.64	*0.8*	*1.26*	*1.26*	100	*1.26*	*3.32*	125.76
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	185	*36*	48	*48*	100	48	*132*	71.35
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	2	*2*	2	*2*	100	2	*6*	300.00

2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	46090	*46090*	46590	*46590*	100	46590	*139270*	302.17
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6	*1*	2	*2*	100	1	*4*	66.67

2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan TingkatDaerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yangDitingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150	*120*	105	*105*	100	34	*259*	172.67
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	8	*0*	12	*12*	100	3	*15*	187.50
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yangDibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	16	*10*	2	*2*	100	2	*14*	87.50
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	15	*100*	8	*8*	100	5	*113*	753.33
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1250	*250*	250	*250*	100	250	*750*	60.00

2.23.02.2.02	*Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah Pembudayaan Gemar Membaca	30	*5*	5	*5*	100	5	*15*	50.00
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan LiterasiPada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasipada Satuan Pendidikan	20	*2*	9	*9*	100	4	*15*	75.00

2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8	*0*	1	*1*	100	9	*10*	125.00
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	10	*4*	7	*7*	100	2	*13*	130.00
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	18	*6*	4	*6*	150	3	*15*	83.33
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	15	*3*	3	*3*	100	3	*9*	60.00
2:23:03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	100	*20*	40%	40%	100	60%	*21*	21.00
2.23.03.2.01	*Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah Naskah Kuno	25	*5*	5	*5*	100	5	*15*	60.00

2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimilikioleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikandan Didayagunakan	25	*5*	5	*5*	100	5	*15*	60.00
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang BerperanSerta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	9	*1*	2	*1*	50	2	*4*	44.44

2.23.03.2.02	*Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang DitemukanOleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada diwilayahnya (item)	1648	*300*	300	*300*	100	300	*900*	54.61
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	1648	*300*	300	*300*	100	300	*900*	54.61
2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	1500	*300*	300	*300*	100	300	*900*	60.00
2:24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
2:24:02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip yang dikelola	100	*100*	100	*100*	100	100	*300*	300.00
2.24.02.2.01	*Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola	68101	*2000*	60,101	60,101	100	60,101	*122202*	179.44
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	10137	*1000*	1,000	*1000*	100	1,000	*3000*	29.59
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	57964	*1000*	1,000	*1000*	100	1,000	*3000*	5.18
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil PengawasanArsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	58	*20*	30	*30*	100	40	*90*	155.17
2.24.02.2.02	*Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	24,500	*24,000*	24,000	24,000	100	23000	*71000*	289.80

2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, danAkses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2,500	*24,000*	24000	*24000*	100	24500	*72500*	2900.00

2.24.02.2.03	*Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota*	persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	58	*58*	58	*58*	100	58	*174*	300.00
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1,800	*300*	5	*5*	100	5	*310*	17.22
2:24:03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	100	*50*	65	*65*	100	80	*195*	195.00
2.24.03.2.01	*Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun*	Jumlah arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK	5000	*1000*	1,000	*1000*	100	1,000	*3000*	60.00
2.24.03.2.01.01	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	5000	*1000*	1000	*1000*	100	1000	*3000*	60.00
2.24.03.2.02	*Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota*	Jumlah arsip yang dimusnahkan Sesuai NSPK	2100	*500*	500	*500*	100	500	*1500*	71.43
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	2100	*500*	500	*500*	100	500	*1500*	71.43

2.24.03.2.03	*Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, danPemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan*	Jumlah Arsip yang diselamatkan dan diselamatkan sesuai dengan NSPK	5000	*1000*	1,000	*1000*	100	1,000	*3000*	60.00

2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2500	*500*	500	*500*	100	500	*1500*	60.00
2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2500	*500*	500	*500*	100	500	*1500*	60.00
2.24.03.2.04	*Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota*	Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media sesuai dengan NSPK	2100	*500*	500	*500*	100	500	*1500*	71.43
2.24.03.2.04.02	penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	3500	*500*	500	*500*	100	500	*1500*	42.86
2.24.03.2.05	*Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang*	Jumlah arsip Statis yang ditemukan yang telah dinyatakan hilang sesuai dengan NSPK	2500	*500*	500	*500*	100	500	*1500*	60.00
2.24.03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan	2500	*500*	500	*500*	100	500	*1500*	60.00

	dinyatakan Hilang	Ditetapkan								
2:24:04	PROGRAM PERIJINANPENGGUNAAN ARSIP	Persentase Izin Penggunaan Arsipyang diterbitkan	100	*100*	100	*100*	100	100	*300*	300.00
2.24.04.2.01	*Pelayanan Izin Penggunaan Arsipyang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota*	Jumlah izin penggunaan arsip yangbersifat tertutup di kabupaten/kota	51	*3*	12	*3*	25	12	*18*	35.29

	Penyediaan daftar dan Penetapan izinPenggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang BersifatTertutup	51	*0*	12	*12*	100	12	*24*	47.06
2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOPenggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Dokumen izin	1	*1*	0	*0*	0	0	*0*	0.00

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Dalam konsep ini diperlukan indikator *Input* (masukan),*Output*(keluaran) dan *outcome* (hasil).

Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Indikator Masukan (*Input*), yaitu indikator yang mengambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik berupa sumber dana, sumber daya alam,sumber daya manusia, maupun berupa teknologi dan informasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran;
b. Indikator Keluaran (*Output*), yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik;
c. Indikator Hasil (*Outcome*), yaitu indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Suatu kegiatan dinilai ekonomis bila sumber daya alam yang digunakan sebaik-baiknya sebagai input kegiatan. Sedangkan penggunaan *input* sebaiknya untuk mendapatkan *output* secara maksimal dinamakan efisien. Selanjutnya, Seberapa besar output akan menghasilkan *outcome* dinamakan efektif.

Penilaian seberapa besar nilai ekonomis dan nilai efesien suatu kegiatan dapat dilihat secara langsung atau jangka pendek, karena *output* merupakan hasil langsung dari suatu kegiatan. Namun sulit untuk menilai seberapa efektif suatu kegiatan karena efektifitas baru dapat dinilai pada jangka menengah yang membutuhkan beberapa tahun penelitian atau penilaian.

Ditambahkan lagi dengan seluruh program/kegiatan ditahun 2025 belum dapat diidentifikasi dikarenakan sedang berjalan dan seperti biasa tentunya sedikit ada perubahan-perubahan di pertengahan tahun. Melihat kondisi yang ada ini maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan hanya menjabarkan program kerja yang sedang berjalan atau dalam proses pengerjaan.

A. Analisis Kinerja Output

Berdasarkan data-data yang ada dan hasil kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu 6 (Enam) program dan 20 Kegiatan ditahun 2023 hasil realisasi keseluruhan diangka 91,65 %. Hal ini tentu merupakan proses pekerjaan yang sangat baik. Dalam hal ini pula tentunya program- program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nanti oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, sejalan dengan program pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD dan termaktud dalam RKPD di tahun 2024. diharapkan pula tentunya ada peningkatan dan perbaikan-perbaikan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil tersebut Evaluasi Kinerja dari kegiatan, bahwa semua PPTK telah berusaha maksimal dan berhasil dalam upaya merealisasikan target kinerja yang telah disepakati dalam DPA kegiatan di awal tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bersungguh-sungguh dalam upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Analisa Kinerja Keuangan

Analisa Kinerja keuangan dilakukan untuk melihat efesiensi realisasi penyerapan dana berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Analisa keuangan disini sama halnya dengan analisa kinerja output, artinya pengukuran serapan anggaran keuangan yang dituangkan dalam kegiatan belum dapat diketahui dengan jelas. Maka dalam hal ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mengambil perbandingan tahun sebelumnya.

Tabel TC.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator*)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terwujudnya BudayaBaca Masyarakat		Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	62.50	63.30	63.50	64.00	52.50	62.52	-	_	Realisasi capaian kinerja tahun 2023 telah melebihi target
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan pada Perangkat Daerah		Persentase PD yang menerapkan Pengelolan arsip kategori B	50.00	75.00	100.00	100.00	50.00	83.92	-	_	Realisasi capaian kinerja tahun 2023 telah melebihi target
3	Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat		Indeks pembangunan literasi masyarakat	14	15	16	17	20.15	56.94	-	_	Realisasi capaian kinerja tahun 2023 kurang tercapai karena salah satu unsur perhitungannyatidak memenuhi target (Pemutahiran Data)
4	Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional		Tingkat Ketersediaan Arsip	85.00	90.00	95.00	100.00	75.00	75.00	-	_	Realisasi capaian kinerja tahun 2023 kurang tercapai karena salah satu instrumen perhitungannya tidak memenuhi target

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.1 Pencapaian Tingkat Kinerja Pelayanan

Dalam hal pencapaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, khususnya *Cakupan OPD yang menerapkan Tingkat ketersediaan arsip* terlihat dari target renstra Pemerintah Daerah dan kemudian dijabarkan dengan realisasi capaian dimana untuk tahun 2023 target renstra sebesar 85 % realisasi capaian sebesar 75,00 % dimana hal tersebut belum memenuhi target Renstra dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Untuk tahun 2024 sebesar 90,00 dan diharapkan realisasi untuk tahun 2024 bisa tercapai sesuai target dari Pemerintah Daerah.

Kemudian untuk IndeksPembangunan Literasi Masyarakattarget renstra sebesar 59 realisasi capaian sebesar 56,94 dimana hal tersebut belum memenuhi target renstra dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Adapun tingkat pelayanan dengan parameter pengunjung perpustakaan pada tahun 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Artinya program kegiatan tercapai, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan fasilitas perpustakaan yang lebih baik dari tahun berjalan seperti, *pembuatan kartu anggota, penelusuran buku dengan komputerisasi* dan efektifnya perpustakaan keliling serta perpustakaan digital (ikukar).

Untuk proyeksi tahun 2024 dengan parameter pengunjung perpustakaan juga mengalami peningkatan, Melihat dari kondisi yang ada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan meyakinkan adanya peningkatan yang lebih baik dari target yang ditentukan, dengan meningkatkan kinerja sumber daya manusia serta membuat inovasi-inovasi yang baru.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

A. Permasalahan Pokok Urusan Perpustakaan

Rendahnya budaya baca masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan permasalahan pokok yang terjadi pada urusan Perpustakaan, hal ini disebabkan karena belum optimalnya kinerja pembinaan dan pengelolaan perpustakaan serta belum dilaksanakannya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno.

Adapun yang menjadi akar masalah pada urusan perpustakaan adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Akses: Perpustakaan mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya atau koleksi yang diperlukan oleh pengguna karena keterbatasan dana atau kebijakan pengelolaan.
2. Kualitas Koleksi: Koleksi yang tersedia mungkin tidak memenuhi kebutuhan atau minat pengguna, atau kualitasnya mungkin rendah.
3. Teknologi dan Sistem Manajemen Perpustakaan (SMP): Kekurangan dalam sistem manajemen perpustakaan atau kurangnya integrasi dengan teknologi modern bisa menjadi kendala. Ini bisa termasuk sistem katalog yang tidak efisien, perangkat lunak yang usang, atau infrastruktur IT yang kurang memadai.
4. Infrastruktur Fisik: Fasilitas fisik perpustakaan mungkin tidak memadai, termasuk ruang yang terlalu kecil, kurangnya fasilitas seperti meja dan kursi yang cukup, atau kurangnya ruang untuk acara atau program.
5. Pengelolaan Koleksi: Koleksi mungkin tidak dikelola dengan baik, termasuk masalah seperti kurangnya pembaruan, inventarisasi yang tidak tepat, atau kurangnya perhatian terhadap kebutuhan pengguna.
6. Kurangnya Promosi dan Pendidikan Pengguna: Pengguna mungkin tidak menyadari sumber daya atau layanan yang tersedia di perpustakaan, atau mungkin tidak tahu cara mengakses atau memanfaatkannya.
7. Kurangnya Keberlanjutan: Perpustakaan mungkin mengalami kesulitan keuangan atau keberlanjutan jangka panjang karena kurangnya pendanaan atau dukungan dari pemerintah atau lembaga lainnya.
8. Ketidaksetaraan Akses: Beberapa anggota masyarakat mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses perpustakaan karena keterbatasan fisik atau keuangan, atau karena kurangnya aksesibilitas bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau berpenghasilan rendah.

9. Kurangnya Keterlibatan Komunitas Dalam Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial: Kurangnya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam program-program perpustakaan atau kegiatan-kegiatan sosial juga bisa menjadi masalah.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, perpustakaan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, serta mengembangkan strategi yang sesuai untuk meningkatkan kualitas layanan dan aksesibilitas bagi pengguna.

B. Permasalahan Pokok Urusan Kearsipan

Masalah yang terkait dengan urusan kearsipan juga dapat bervariasi tergantung pada konteks organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Berikut adalah beberapa akar permasalahan umum dalam pengelolaan arsip.

Adapun yang menjadi akar permasalahan pada urusan kearsipan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Kebijakan dan Prosedur: Ketersediaan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk pengelolaan arsip sangat penting.

   Kurangnya kebijakan yang tepat dan prosedur yang disusun dengan baik dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam pengelolaan arsip, termasuk masalah seperti penyimpanan yang tidak teratur, pemeliharaan yang tidak memadai, dan kesulitan dalam mengakses arsip yang diperlukan.
2. Kurangnya Sumber Daya: Kurangnya anggaran, personel, atau infrastruktur yang diperlukan untuk mengelola arsip dengan efektif dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk kurangnya ruang penyimpanan yang memadai, kurangnya pelatihan staf, dan kurangnya perangkat lunak atau teknologi yang diperlukan.
3. Teknologi dan Sistem Manajemen Arsip (SMA): Teknologi yang usang atau kurangnya implementasi sistem manajemen arsip (SMA) yang tepat dapat menyebabkan kesulitan dalam mengatur, mengelola, dan mengakses arsip dengan efisien. Sistem yang tidak terintegrasi dengan baik atau tidak memadai juga dapat menyebabkan masalah

dalam pencarian dan pengambilan arsip.

4. Kurangnya Keterampilan dan Kesadaran: Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pengelolaan arsip yang baik dan kurangnya keterampilan dalam melakukan tugas-tugas pengelolaan arsip juga dapat menjadi masalah. Pelatihan yang kurang atau kurangnya kesadaran akan kebijakan dan prosedur yang ada dapat menyebabkan kesalahan atau kecenderungan untuk mengabaikan praktik terbaik dalam pengelolaan arsip.
5. Penyimpanan Fisik yang Tidak Tepat: Penyimpanan arsip fisik yang tidak terorganisir dengan baik atau tidak memadai dapat menyebabkan kesulitan dalam menemukan dan mengakses dokumen yang diperlukan, serta risiko kerusakan atau kehilangan arsip akibat kondisi lingkungan yang tidak sesuai (Belum adanya Depo Arsip).
6. Masalah Kepatuhan dan Privasi: Ketidakpatuhan terhadap peraturan atau kebijakan privasi, seperti GDPR (*General Data Protection Regulation*), atau ketidakpatuhan terhadap standar- standar arsip yang diatur oleh lembaga pemerintah atau industri tertentu dapat menyebabkan risiko hukum dan reputasi bagi organisasi.
7. Masalah Penghapusan: Kebijakan penghapusan yang tidak jelas atau tidak diterapkan dengan konsisten dapat menyebabkan penumpukan arsip yang tidak perlu, meningkatkan biaya penyimpanan, dan menyulitkan pengelolaan arsip secara keseluruhan.
8. Perubahan Teknologi dan Kebutuhan Bisnis: Perubahan dalam teknologi atau kebutuhan bisnis dapat menyebabkan tantangan baru dalam pengelolaan arsip, termasuk integrasi data dari berbagai sumber atau format, serta kebutuhan untuk mengelola arsip digital dengan efektif.
9. Risiko Bencana: Kurangnya perencanaan mitigasi risiko bencana atau kurangnya langkah-langkah pemulihan bencana yang sesuai dapat meningkatkan risiko kehilangan arsip penting akibat bencana alam atau insiden lainnya.

10. Masalah Kepemimpinan dan Budaya Organisasi: Kurangnya dukungan atau kesadaran dari puncak kepemimpinan, serta budaya organisasi yang tidak mendukung praktik pengelolaan arsip yang baik, juga dapat menjadi hambatan dalam upaya untuk meningkatkan pengelolaan arsip.

    Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, perangkat daerah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap kebutuhan dan tantangan dalam pengelolaan arsip mereka, serta mengembangkan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan praktik pengelolaan arsip dan memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku.

2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi

Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, capaian strategis program Nasional/Internasional, SPM dan MDGS. Visi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026 adalah mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia, untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi sebagaiberikut :

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yangberakhlak mulia, unggul dan berbudaya;
3. Memperkuat pembangunan ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang BerwawasanLingkungan.

Adapun Dinas Kearsipan dan Perpustakaan masuk pada misi :

1. Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani. Dampak terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian Program Nasional :

a. Tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan/tokoh nasional;

b. Peningkatan gemar membaca;
c. Meningkatkan penataan dan penguatan organisasi kearsipan;
d. Penyelamatan, pengolahan, pelindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik;
e. Terselenggaranya Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
f. Penyelamatan, pengolahan, pelindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik;
g. Meningkatkan kuantitas dan kualitas koleksi perpustakaan;
h. Peningkatan diversifikasi dan kualitas layanan perpustakaan berbasis TIK melalui perpustakaan digital;
i. Peningkatan kualitas dan kapasitas perpustakaan sebagai pusatsumber belajar;
j. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan

Tantangan adalah hal-hal yang dapat menghambat kepada keberhasilan Program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain :

Tantangan Penyelenggaraan Urusan Kearsipan :

a. Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Kearsipan: Banyak organisasi atau individu yang kurang menyadari pentingnya kearsipan dan dampak positifnya terhadap efisiensi dan efektivitas operasional. Akibatnya, sering kali kurangnya dukungan dan alokasi sumber daya yang memadai untuk kegiatan kearsipan.
b. Kurangnya Sumber Daya: Penyelenggaraan kearsipan membutuhkan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi yang cukup. Tantangan ini dapat berupa keterbatasan anggaran untuk pelatihan staf, peralatan dan infrastruktur kearsipan yang memadai, serta kurangnya personel yang terlatih dalam manajemen arsip.

c. Teknologi dan Sistem Informasi yang Usang: Banyak organisasi masih mengandalkan sistem kearsipan tradisional yang belum diperbarui atau diintegrasikan dengan teknologi informasi modern. Hal ini dapat menghambat aksesibilitas, pengelolaan, dan keamanan arsip.
d. Ruang Fisik yang Terbatas: Penyimpanan fisik arsip dapat menjadi masalah, terutama di organisasi yang memiliki ruang kantor terbatas. Keterbatasan ruang dapat menyebabkan kesulitan dalam menyimpan dan mengelola arsip secara efisien.
e. Ketidakpatuhan Terhadap Kebijakan dan Standar Kearsipan: Kurangnya pemahaman atau kesadaran tentang kebijakan dan standar kearsipan yang berlaku dapat menyebabkan ketidakpatuhan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko kehilangan atau penggunaan arsip yang tidak efisien.
f. Kesulitan dalam Pengelolaan dan Retensi Data Elektronik: Dengan meningkatnya penggunaan data elektronik, organisasi sering kali menghadapi kesulitan dalam pengelolaan dan retensi data elektronik. Tantangan ini termasuk penentuan metode penyimpanan yang aman dan kebijakan retensi data yang efektif.
g. Risiko Keamanan dan Privasi: Perlindungan terhadap keamanan dan privasi data arsip sangat penting, terutama dengan meningkatnya ancaman keamanan cyber. Tantangan dalam menjaga keamanan dan privasi data arsip meliputi kebocoran data, akses yang tidak sah, dan penyalahgunaan data.
h. Kehilangan dan Kerusakan Arsip: Kerusakan atau kehilangan arsip dapat terjadi karena berbagai faktor seperti bencana alam, kebakaran, banjir, atau kesalahan manusia. Tantangan ini menekankan perlunya strategi pemulihan bencana dan perlindungan arsip yang efektif.
i. Keterbatasan dalam Aksesibilitas Informasi: Kearsipan yang tidak terorganisir dengan baik atau kurangnya metadata yang memadai dapat menghambat aksesibilitas informasi yang penting dan menghambat produktivitas organisasi.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, organisasi perlu mengadopsi pendekatan yang komprehensif dalam manajemen kearsipan, termasuk investasi dalam pelatihan staf, pengembangan infrastruktur teknologi, penerapan kebijakan yang jelas, dan pematuhan terhadap standar kearsipan yang berlaku.

Tantangan Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan :

1. Keterbatasan Anggaran: Banyak perpustakaan mengalami keterbatasan anggaran, yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk memperbarui koleksi, memperbaiki infrastruktur, atau menyediakan layanan tambahan.
2. Perubahan Teknologi: Perkembangan teknologi terus berubah dengan cepat, mempengaruhi cara orang mengakses dan menggunakan informasi. Perpustakaan harus terus mengikuti perkembangan ini untuk tetap relevan dan bermanfaat bagi pengguna.
3. Perubahan Kebutuhan Pengguna: Kebutuhan pengguna perpustakaan dapat berubah seiring waktu. Perpustakaan harus mampu menyesuaikan layanan dan koleksinya untuk memenuhi kebutuhan dan minat yang berkembang dari pengguna mereka.
4. Persaingan dengan Sumber Informasi Digital: Sumber informasi digital seperti internet dan platform daring menyediakan akses cepat dan mudah ke informasi. Perpustakaan harus berinovasi dalam menyediakan nilai tambah yang berbeda untuk tetap relevan bagi pengguna.
5. Isu Literasi Informasi: Keterampilan literasi informasi menjadi semakin penting di era digital ini. Perpustakaan mungkin dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan literasi informasi di antara pengguna mereka.
6. Diversifikasi Kebutuhan Pengguna: Pengguna perpustakaan berasal dari berbagai latar belakang dan memiliki kebutuhan yang beragam. Menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan semua pengguna dapatmenjadi tantangan tersendiri.
7. Aksesibilitas dan Inklusivitas: Perpustakaan harus memastikan bahwa layanan dan fasilitas mereka dapat diakses oleh semua orang, termasuk orang dengan disabilitas dan kelompok-kelompok yang kurang mampu.

8. Pemeliharaan dan Pengembangan Koleksi: Memelihara koleksi perpustakaan yang relevan dan bermanfaat sambil menghadapi keterbatasan ruang dan anggaran merupakan tantangan tersendiri.
9. Pembangunan Sumber Daya Manusia: Ketersediaan staf yang terlatih dan berkualitas menjadi kunci dalam penyelenggaraan perpustakaan yang efektif. Mengembangkan staf dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan modern juga merupakan tantangan.
10. Pengelolaan Data dan Privasi: Perpustakaan sering menyimpan informasi sensitif tentang pengguna mereka. Menjaga privasi dan keamanan data menjadi tantangan penting dalam lingkungan yang semakin terhubung secara digital.

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan strategi yang holistik, kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, serta kreativitas dan fleksibilitas dalam menjawab perubahan lingkungan yang dinamis.

Beberapa peluang yang akan mendukung kepada kelancaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

Peluang Penyelenggaran Urusan Kearsipan :

a. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik nomor 82 Tahun 2012 semakin mengukuhkan peranan/arti pentingarsip dalam penyelenggaraan administrasi kepemerintahandan pembangunan;
b. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sertaKearsipan di dunia Internasional memberi ruang yang lebih luas dalam penerapan Teknologi dan Informasi dalam rangka
c. penyelenggaraan Sistem dan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
d. Ketersediaan arsip yang *autentik* dan *relliable* merupakan keharusan dalam akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menuju *Good Governance*.

Peluang Penyelenggaran Urusan Perpustakaan :

a. Paradigma global (Pola/Pandangan Umum) dalam penyelenggaraan informasi dan Ilmu Pengetahuan memberikan peluang bagi untuk melakukan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat Informasi, edukasi, penelitian, reservasi dan rekreasi secara profesional dan berkelanjutan dan harus berkembang berbasis Teknologi Informasi;
b. Kewajiban mengembangkan minat baca, menyediakan koleksi bacaan, memberikan bahan bacaan yang menjadi topik hangat dimasyarakat, dan melestarikan Budaya setempat (*local culture*) adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
c. Perpustakaan sebagai Agen perubahan perlu memberikan ruang untuk aktualisasi dan apresiasi masyakatnya serta memberikan sarana untuk aktivitas akademik seperti diskusi, seminar dan workshop dan kegiatan kultural lainnya.

2.3.5 Formulasi Isu – Isu Kearsipan dan Perpustakaan

1. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memerintahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk segera menyusun dan menetapkan empat pilar instrumen pengelolaan arsip dinamis berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Meminta Kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB untuk menyediakan formasi Arsiparis bagi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai dengan analisa kebutuhan beban kerja kearsipan di lingkungannya;
3. Mendorong Pemerintah Daerah serta Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendukung penguatan kelembagaan, anggaran dan SDM semua jenis perpustakaan agar peran dan fungsi perpustakaan dalam perbaikan kualitas pelayanan perpustakaan sebagai hak masyarakat semakin maksimal;
4. Mendorong seluruh pemangku kepentingan bidang perpustakaan agar penguatan literasi sebagai salah satu pilar peningkatan kualitas SDM Indonesia Kutai Kartanegara yang termaktub dalam RPJMN Tahun 2020-2024 agar Pemerintah

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memasukkan penguatan budaya literasi sebagai arah kebijakan dalam pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;

5. Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan revitalisasi dan pembangunan insfrastruktur fasilitas layanan perpustakaan sebgai institusi layanan publik yang terbuka dan inklusif sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang didukung melalui skema pendanaan APBD setiap tahun;
6. Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap upaya penguatan budaya literasi masyarakat melalui pengembangan perpustakaan dan diseminisasi bahan bacaan terapan dengan memanfaatkan TIK dan sarana dan prasarana lainnya secara luas, serta mendorong masyarakat terus melakukan gerakan sosial mendukung aktivitas pegiat literasi di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Program dan Kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan harus mengarah pada upaya peningkatan literasi masyarakat dan tertib arsip di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kerangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara holistik, integratif dan spasial dengan tata kelola pemerintahan yang berbasis tertib arsip.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) 2025 tentu harus dengan tingkat analisa dan evaluasi yang komprehensif mulai dari telaahan terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah tahun lalu dengan Renstra Pemerintah Daerah, model analisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu apa yang didapat sesuai dengan tupoksi Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, melihat dari interprestasi yang ada maka untuk mendukung Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2025 perlu membuat rencana kerja RKPD. Tentunya dalam penyusunan program kegiatan ditahun 2025, harus mengacu dari renstra yang ada ditambah dengan masukan dari masyarakat.

Terhadap rencana kerja RKPD tahun 2025 yang telah disusun, sudah melalui hasil telaahan yang komprehensif dari pemangku kepentingan di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Tabel TC.31

Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Rancangan Akhir RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan							Catatan penting
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kukar	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73	13,487,081,807	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kukar	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73	19,965,121,810	
1	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kukar	*Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*5 Dokumen / 7 Laporan*	*679,738,367*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kukar	*Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*5 Dokumen / 7 Laporan*	1,000,000,000	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50,000,000	

	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Tengga rong	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	250,000,000	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tengga rong	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	73,738,367	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	450,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kukar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kukar	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kukar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kukar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	256,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	250,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	150,000,000	
2	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	Kukar	*Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen / 4 Laporan / 95*	*11,020,127,230*	*Administrasi Keuangan Perangkat*	Kukar	*Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat*	*1 Dokumen / 4 Laporan /*	*12,145,997,858*	

			yang akuntabel	*Orang/Bulan*		*Daerah*		*Daerah yang akuntabel*	*1330 Orang/Bulan*		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kukar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 orang/bulan	10,840,127,230	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kukar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1330 orang/bulan	12,015,997,858	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	80,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Se mesteran SKPD	3 Laporan	80,000,000	

	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kukar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	50,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kukar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25,000,000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kukar	*Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah*	*1 Laporan*	22,500,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kukar	*Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah*	*1 Laporan*	105,000,000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						Tenggarong	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*1 Dokumen*	25,000,000	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50,000,000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	22,500,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30,000,000	

4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	*130 paket / 12Orang*	149,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kukar	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	*130 paket / 12Orang*	349,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kukar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	130 Paket	104,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tengga rong	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	104,000,000	

	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-UndanganJumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-UndanganJumlah Inovasi	12 Orang	45,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tengga rong	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-UndanganJumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-UndanganJumlah Inovasi	760 Orang	45,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kukar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kukar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 orang	200,000,000	

5	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	Kukar	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*8*	518,194,374	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	Kukar	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*8*	2,340,364,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kukar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	22,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22,500,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kukar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 paket	124,057,054	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kukar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	1,516,000,000	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kukar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	31 Paket	36,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	36,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kukar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	82390 Paket	22,050,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kukar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22,050,000	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kukar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5580 Dokumen	23,814,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kukar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	23,814,000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kukar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	19,773,320	Penyediaan Bahan/Material	Kukar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	300,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	180,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kukar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	180,000,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dokumen	90,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	90,000,000	

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kukar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	150,000,000	

								pada SKPD			
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kukar	*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	12	967,521,836	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kukar	*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	12	3,817,259,952	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 Laporan	1,320,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tengga rong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,320,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	291,600,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tengga rong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	291,600,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	674,601,836	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tengga rong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,524,339,952	

7	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kukar*	*Jumlah Barang Milik Daerah*	*218*	130,000,000	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kukar*	*Jumlah Barang Milik Daerah*	*218*	207,500,000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kukar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	40,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	40,500,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kukar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	40,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	40,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kukar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	206 Unit	22,500,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	206 Unit	100,000,000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kukar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	27,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	27,000,000	
II	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kukar	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	42.34	1,955,000,000	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kukar	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	42.34	8,926,000,000	
8	*Pengelolaan Perpustakaan TingkatDaerah Kabupaten/Kota*	Kukar	*Persentase perpustakaan sesuaistandar nasional perpustakaan*	*2.18*	*660,000,000*	*Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	Kukar	*Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan*	*2.18*	*2,826,000,000*	

	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Unit	100,000,000	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai	7 Perpustakaan	950,000,000	

								Kewenangannya			
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukanyang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	48 layanan	185,000,000	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	48 layanan	175,000,000	
	Pembinaan Perpustakaan Umumdan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	2 Perpustakaan	25,000,000	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	6 Perpustakaan	150,000,000	

	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34 Orang	150,000,000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	450,000,000	

	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1Dokumen	50,000,000	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	200,000,000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kukar	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	46590 Eksemplar	100,000,000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kukar	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	46590 Eksemplar	280,000,000	

	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	250 Eksemplar	75,000,000	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	300 Eksemplar	126,000,000	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kukar	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	2 layanan	75,000,000	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kukar	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	2 Perpudtakaan	333,000,000	

	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Kukar	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	3 Perpustakaan	75,000,000	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Kukar	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	12 Perpustakaan	162,000,000	

9	*Pembudayaan GemarMembaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	Kukar	Jumlah Pembudayaan Gemar Membaca	5 kali	1,295,000,000	*Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	Kukar	Jumlah PembudayaanGemar Membaca	5 kali	6,100,000,000	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Kukar	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	4 Lokus	50,000,000	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Kukar	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan dan Masyarakat	4 Lokus	200,000,000	
	Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	1,050,000,000	Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12 Perpustakaan	5,400,000,000	
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kukar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	2 Orang	70,000,000	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Prov. Kalimantan Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	12 Orang	200,000,000	

	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kukar	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	75,000,000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kukar	Jumlah Llayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	200,000,000	
	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah	Kukar	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	3 Orang	50,000,000	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah	Kukar	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	3 Orang	100,000,000	
III	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Kukar	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	80%	320,000,000	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Kukar	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	80%	535,511,117	
10	*Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota*	Kukar	Jumlah Naskah Kuno	5 Naskah	180,000,000	*Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota*	Kukar	Jumlah Naskah Kuno	5 Naskah	360,000,000	
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk	Kukar	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan	5 Eksemplar	100,000,000	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh	Kukar	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan	5 Eksemplar	100,000,000	

	dilestarikan dan didayagunakan		untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan		Didayagunakan			
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kukar	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	2 Orang	80,000,000	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kukar	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	200 Orang	260,000,000	

11	*Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	Kukar	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	300 Eksemplar	140,000,000	*Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	Kukar	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	300 Eksemplar	175,511,117	
	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kukar	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	300 Eksemplar	90,000,000	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Tengga rong	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat	200 Eksemplar	125,511,117	

								Kabupaten/Kota			
	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kukar	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	300 Eksemplar	50,000,000	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Tengga rong	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	300 Eksemplar	50,000,000	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kukar	Persentase arsip yang dikelola	100	800,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kukar	Persentase arsip yang dikelola	100	1,075,000,000	
12	*Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota*	Kukar	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola	66101 Berkas	450,000,000	*Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota*	Kukar	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola	66101 Berkas	750,000,000	
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kukar	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1000 Berkas	75,000,000	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kukar	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1000 Berkas	150,000,000	

	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kukar	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1000 Berkas	75,000,000	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kukar	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1000 Berkas	75,000,000	

	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	300,000,000	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	525,000,000	
13	*Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota*	Kukar	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	24000 Arsip	150,000,000	*Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota*	Kukar	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	24000 Arsip	150,000,000	
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kukar	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	25000 Arsip	150,000,000	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kukar	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	25000 Arsip	150,000,000	
14	*Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota*	Kukar	persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	58 OPD	200,000,000	*Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota*	Kukar	persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	58 OPD	175,000,000	

	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	300 Laporan	200,000,000	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Prov. Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	175,000,000	
V	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Kukar	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	95%	500,000,000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Kukar	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	95%	695,000,000	

15	*Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun*	Kukar	Jumlah arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK	1000 Arsip	100,000,000	*Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun*	Kukar	Jumlah arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK	1000 Arsip	190,000,000	

	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kukar	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1000 Arsip	100,000,000	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kukar	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1000 Arsip	190,000,000	
16	*Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota*	Kukar	Jumlah arsip yang dimusnahkan Sesuai NSPK	500 Berkas	75,000,000	*Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota*	Kukar	Jumlah arsip yang dimusnahkan Sesuai NSPK	500 Berkas	0	
	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kukar	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	75,000,000	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kukar	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	0	0	
17	*Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan*	Kukar	Jumlah Arsip yang diselamatkan dan diselamatkan sesuai dengan NSPK	500 Daftar / 500 Arsip	150,000,000	*Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan*	Kukar	Jumlah Arsip yang diselamatkan dan diselamatkan sesuai dengan NSPK	500 Daftar / 500 Arsip	330,000,000	

	Desa/Kelurahan										

	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Daftar	75,000,000	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Daftar	165,000,000	
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Arsip	75,000,000	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Arsip	165,000,000	

18	*Autentikasi Arsip Statis dan Arsip HasilAlih Media Kabupaten/Kota*	Kukar	Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media sesuai dengan NSPK	500 Arsip	100,000,000	*Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota*	Kukar	Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media sesuai dengan NSPK	500 Arsip	100,000,000	
	penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kukar	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	500 Arsip	100,000,000	penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Tenggarong , Luar Daerah	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	500 Arsip	100,000,000	
19	*Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang*	Kukar	Jumlah arsip Statis yang ditemukan yang telah dinyatakan hilang sesuai dengan NSPK	500 Arsip	75,000,000	*Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang*	Kukar	Jumlah arsip Statis yang ditemukan yang telah dinyatakan hilang sesuai dengan NSPK	500 Arsip	75,000,000	
	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Kukar	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500 Arsip	75,000,000	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Kukar	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500 Arsip	75,000,000	

VI	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	Kukar	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	100%	75,000,000	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	Kukar	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	100%	75,000,000	
20	*Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota*	Kukar	Jumlah izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota	12 Arsip	75,000,000	*Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota*	Kukar	Jumlah izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota	12 Arsip	75,000,000	
	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kukar	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	12 Arsip	75,000,000	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kukar	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	12 Arsip	75,000,000	
JUMLAH					17,137,081,807					31,271,632,927	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program Kegiatan diperoleh dari rapat keseluruhan Bidang/Sub bidang internal Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kutai Kartanegara. Setelah hasil dari rapat kerja dicapai kemudian dituangkan kedalam rencana kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ditahun 2025. Untuk hal penelaahan usulan program masyarakat kegiatan masyarakat Dinas Kearsipan dan perpustakaan tentu memiliki beberapa program kegiatan, Khususnya tentang Program Pembinaan Perpustakaan yang dimiliki Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Sehingga hal tersebut menjadikan rujukan adanya penambahan kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Untuk memastikan pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan dapat masuk dan terwakilkan melalui program kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2025, maka di finalisasi melalui Musrenbang di Kecamatan. Usulan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dari masyarakat meliputi Pembangunan tempat/gedung perpustakaan kelurahan/desa dan sarana prasarana Perpustakaan guna menunjang pendidikan dan kesejahteraan Masyarakat.

Pemenuhan usulan program/kegiatan/sub kegiatan masyarakat sangat penting sebagai upaya peningkatan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan berbudaya baca.

Adapun usulan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kecamatan terdiri dari 12 (Dua Belas) pembangunan tempat/gedung perpustakaan dan 7 (Tujuh) Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan Desa/Kelurahan.

Tabel TC.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Kamus usulan	Kecamatan	Jumlah Usulan
1	Pengadaan sarana dan prasaranaperpustakaan digital	Kembang Janggut, Muara Kaman, Kota Bangun, MuaraBadak, Muara Wis	7
2	Pembangunan gedung perpustakaan Desa /Kelurahan	Samboja, Tenggarong Seberang, Marang Kayu, Muara Kaman, Muara Jawa, Kota Bangun, Kota Bangun Darat,Muara Badak, Muara Wis, Tenggarong, Muara Muntai	12

BAB III
TUJUAN DAN SASARANPERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional memberikan implikasi kepada Daerah untuk melaksanakan pendekatan baru dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah akan dilaksanakan dengan pendekatan holistik-tematik, integratifdan spasial untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sasaran agenda prioritas daerah. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Lembaga Kearsipan Daerah dan sebagai penyelenggara perpustakaan Daerah selalu berupaya untuk meningkatkan tata kelola kearsipan di daerah dan peningkatan budaya baca masyarakat.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam pengelolaan dan penataan kearsipan dalam gerakan nasional sadar tata arsip (GNSTA) telah menjadi inspirasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memprioritaskan pengelolaan dan penataan arsip daerah, sedangkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) dalam meningkatkan nilai budaya baca masyarakat melalui Gerakan Literasi untuk kesejahteraan telah memberi semangat untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyediakan bahan bacaan bagi masyarakat serta layanan literasi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan rumusan tujuan yang ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, sebagai berikut:

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
1	Terwujudnya Budaya Baca Masyarakat	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat
	Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaanyang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipanpada Perangkat Daerah	Persentase PD yang menerapkan pengelolaan arsip kategori B
	Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAANPERANGKAT DAERAH

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 mencerminkan rencana kerja dan kegiatan dalam rangka mencapai misi tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada dasarnya Rencana Kerja tahun 2025 menguraikan perencanaan untuk pencapaian target kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024. Target kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitas yang harus dicapai selama tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran strategis akan dijadikan parameter / tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi, misi serta sasaran dan pendanaan kegiatan maupun program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Adapun komponen program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah :

1. Terwujudnya Perpustakaan sesuai standar nasional Perpustakaan dan berbasis inklusi sosial untuk memperkuat budaya literasi

   Melalui :

   PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN dengan Kegiatan :

   a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
   b. PembudayaanGemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

   PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

   dengan kegiatan :

   a. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota;
   b. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan olehPemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alatbukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional melalui :

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP dengan Kegiatan :

a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota;
b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota;
c. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional TingkatKabupaten/Kota.

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP dengan Kegiatan :

a. Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun;
b. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota;
c. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
d. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota;
e. Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang.

PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP dengan kegiatan :

Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota.

Serta program penunjang yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan Kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah.

Adapun rincian Program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel TC.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Data Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	6	5	7	9	10	11
I	2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kukar	73	19,965,121,810		73	13,487,081,807
1	*2.24.01.2.01*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kukar	*5 Dokumen / 7 Laporan*	1,000,000,000		*5 Dokumen / 7 Laporan*	*679,738,367*
	2.24.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong	1 Dokumen	50,000,000		-	0
	2.24.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Tenggarong	1 Data	250,000,000		-	0

	2.24.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	1 Berita Acara	50,000,000		-	0

	2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kukar	3 Dokumen	450,000,000	3 Dokumen	73,738,367
	2.24.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kukar	0	0	1 Dokumen	50,000,000
	2.24.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kukar	0	0	1 Dokumen	50,000,000
	2.24.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	3 Laporan	50,000,000	4 Laporan	256,000,000
	2.24.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kukar	2 Laporan	150,000,000	3 Laporan	250,000,000
2	*2.24.01.2.02*	*Administrasi Keuangan Perangkat*	*Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel*	Kukar	*1 Dokumen / 4 Laporan / 1330*	*12,145,997,858*	*1 Dokumen / 4 Laporan /*	*11,020,127,230*

		Daerah			*Orang/Bulan*		*95 Orang/Bulan*		
	2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kukar	1330 orang/bulan	12,015,997,858	95 orang/bulan	*10,840,127,230*	

	2.24.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kukar	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	50,000,000	
	2.24.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kukar	3 Laporan	80,000,000	3 Laporan	80,000,000	
	2.24.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kukar	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	50,000,000	
3	*2.24.01.2.03*	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah*	Kukar	*1 Laporan*	105,000,000	*1 Laporan*	*22,500,000*	
	2.24.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	*1 Dokumen*	25,000,000	-	0	

	2.24.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	1 Laporan	50,000,000	-	0
	2.24.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	22,500,000

4	*2.24.01.2.05*	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kukar	*130 paket / 12 Orang*	349,000,000	*130 paket / 12 Orang*	*149,000,000*
	2.24.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tenggarong	1 Paket	104,000,000	130 Paket	104,000,000
	2.24.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Inovasi	Tenggarong	760 Orang	45,000,000	12 Orang	45,000,000
	2.24.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kukar	50 orang	200,000,000	-	0

5	*2.24.01.2.06*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	Kukar	*8*	2,340,364,000	*8*	*518,194,374*
	2.24.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tenggarong	1 Paket	22,500,000	15 Paket	22,500,000
	2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kukar	8 Paket	1,516,000,000	60 Paket	124,057,054
	2.24.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tenggarong	1 Paket	36,000,000	31 Paket	36,000,000

	2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kukar	1 Paket	22,050,000	82390 Paket	22,050,000
	2.24.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kukar	1 Dokumen	23,814,000	5580 Dokumen	23,814,000
	2.24.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kukar	1 Paket	300,000,000	1 Paket	19,773,320
	2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kukar	200 Laporan	180,000,000	200 Laporan	180,000,000
	2.24.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kukar	1	90,000,000	1500 Dokumen	90,000,000

					Dokumen			
	2.24.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kukar	1 Dokumen	150,000,000	-	0
6	*2.24.01.2.08*	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	Kukar	12	3,817,259,952	12	967,521,836
	2.24.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	1 Laporan	1,320,000	120 Laporan	1,320,000
	2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tenggarong	12 Laporan	291,600,000	12 Laporan	291,600,000
	2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tenggarong	12 Laporan	3,524,339,952	12 Laporan	674,601,836
7	*2.24.01.2.09*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Barang Milik Daerah*	*Kukar*	*218*	207,500,000	*218*	*130,000,000*
	2.24.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tenggarong	6 Unit	40,500,000	4 Unit	40,500,000

	2.24.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tenggarong	12 Unit	40,000,000	6 Unit	40,000,000
	2.24.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tenggarong	206 Unit	100,000,000	206 Unit	22,500,000
	2.24.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tenggarong	4 Unit	27,000,000	2 Unit	27,000,000
II	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	Kukar	42.34	8,926,000,000	42.34	2,030,000,000

8	*2.23.02.2.01*	*Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan*	Kukar	*2.18*	*2,826,000,000*	*2.18*	*735,000,000*
	2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Kukar	7 Perpustakaan	950,000,000	1 Unit	100,000,000
	2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Kukar	48 layanan	175,000,000	48 layanan	185,000,000

	2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kukar	6 Perpustakaan	150,000,000	2 Perpustakaan	25,000,000
	2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	100 Orang	450,000,000	34 Orang	150,000,000
	2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	2 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	50,000,000

	2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Kukar	46590 Eksemplar	280,000,000	46590 Eksemplar	100,000,000
	2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kukar	300 Eksemplar	126,000,000	250 Eksemplar	75,000,000

	2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Kukar	2 Perpudtakaan	333,000,000	2 layanan	75,000,000
	2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kukar	12 Perpustakaan	162,000,000	3 Perpustakaan	75,000,000
9	*2.23.02.2.02*	*Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah Pembudayaan Gemar Membaca	Kukar	5 kali	6,100,000,000	5 kali	1,295,000,000
	2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Kukar	4 Lokus	200,000,000	4 Lokus	50,000,000

	2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	12 Perpustakaan	5,400,000,000	1 Perpustakaan	1,050,000,000
	2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Prov. Kalimantan Timur	12 Orang	200,000,000	2 Orang	70,000,000

	2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kukar	3 Perpustakaan	200,000,000	3 Perpustakaan	75,000,000
	2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Kukar	3 Orang	100,000,000	3 Orang	50,000,000
III	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	Kukar	80%	535,511,117	80%	320,000,000
10	2.23.03.2.01	*Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah Naskah Kuno	Kukar	5 Naskah	360,000,000	5 Naskah	180,000,000
	2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Kukar	5 Eksemplar	100,000,000	5 Eksemplar	100,000,000

	2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kukar	200 Orang	260,000,000	2 Orang	80,000,000
11	*2.23.03.2.02*	*Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Kukar	300 Eksemplar	175,511,117	300 Eksemplar	140,000,000

	2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Tenggarong	200 Eksemplar	125,511,117	300 Eksemplar	90,000,000
	2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	Tenggarong	300 Eksemplar	50,000,000	300 Eksemplar	50,000,000
IV	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip yang dikelola	Kukar	100	1,075,000,000	100	800,000,000
12	*2.24.02.2.01*	*Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola	Kukar	66101 Berkas	750,000,000	66101 Berkas	450,000,000
	2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Kukar	1000 Berkas	150,000,000	1000 Berkas	75,000,000
	2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Kukar	1000 Berkas	75,000,000	1000 Berkas	75,000,000
	2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kukar	4 Laporan	525,000,000	50 Laporan	300,000,000
13	*2.24.02.2.02*	*Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	Kukar	24000 Arsip	150,000,000	24000 Arsip	150,000,000
	2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Kukar	25000 Arsip	150,000,000	2500 Arsip	150,000,000

14	*2.24.02.2.03*	*Pengelolaan SimpulJaringan Informasi Kearsipan NasionalTingkat Kabupaten/Kota*	persentase jumlah arsip yangdimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Kukar	58 OPD	175,000,000	58 OPD	200,000,000
	2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga KearsipanDaerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kalimantan Timur	4 Laporan	175,000,000	300 Laporan	200,000,000
V	2.24.03 AM	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Kukar	95%	695,000,000	95%	500,000,000
15	*2.24.03.2.01*	*Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yangMemiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun*	Jumlah arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK	Kukar	1000 Arsip	190,000,000	1000 Arsip	100,000,000
	2.24.03.2.01.01	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi diBawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kukar	1000 Arsip	190,000,000	1000 Arsip	100,000,000

16	*2.24.03.2.02*	*Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yangBerskala Kabupaten/Kota*	Jumlah arsip yang dimusnahkan Sesuai NSPK	Kukar	500 Berkas	0	500 Arsip	75,000,000

	2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Kukar	0	0	500 Arsip	75,000,000
17	*2.24.03.2.03*	*Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan*	Jumlah Arsip yang diselamatkan dan diselamatkan sesuai dengan NSPK	Kukar	500 Daftar / 500 Arsip	330,000,000	500 Daftar / 500 Arsip	150,000,000
	2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	2 Daftar	165,000,000	500 Daftar	75,000,000
	2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kukar	500 Arsip	165,000,000	500 Arsip	75,000,000
18	*2.24.03.2.04*	*Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota*	Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media sesuai dengan NSPK	Kukar	500 Arsip	100,000,000	500 Arsip	100,000,000

	2.24.03.2.04.02	penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Tenggarong , Luar Daerah	500 Arsip	100,000,000	500 Arsip	100,000,000
19	*2.24.03.2.05*	*Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang*	Jumlah arsip Statis yang ditemukan yang telah dinyatakan hilang sesuai dengan NSPK	Kukar	500 Arsip	75,000,000	500 Arsip	75,000,000
	2.24.03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Kukar	500 Arsip	75,000,000	500 Berkas	75,000,000
VI	2.24.04	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	Kukar	100%	75,000,000	100%	75,000,000
20	*2.24.04.2.01*	*Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota*	Jumlah izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota	Kukar	12 Arsip	75,000,000	12 Arsip	75,000,000
	2.24.04.2.01.01	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kukar	12 Arsip	75,000,000	12 Arsip	75,000,000
JUMLAH						31,271,632,927		17,312,081,807

BABV
PENUTUP

A. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran 2025 adalah kegiatan atau sub kegiatan yang mendukung digitalisasi layanan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Selain sebagai upaya menghadapi pandemi yang belum diketahui kapan berakhirnya dan juga sebagai jawaban atas tuntutan zaman atas teknologi dan informasi sudah selayaknya jika digitalisasi layanan perpustakaan dan kearsipan harus segera diwujudkan. Tetapi jika ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan maka inovasi dan kreatifitas sangat diperlukan demi terwujudnya digitalisasi layanan perpustakaan dan kearsipan.

B. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam Dokumen Renja Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini terdapat analisis kebutuhan dana/anggaran yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan 6 (enam) program yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan/sub kegiatan. Baik *output* maupun *outcome* yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara selalu berada dalam koridor untuk mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan adanya rencana kerja yang terukur diharapkan target capaian indikator kinerja kunci Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini dapat tercapai. Dalam pencapaian target juga harus didukung penuh dengan dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia yang propesional di lingkungan Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan Kearsipan Daerah dan Gerakan Budaya Baca Masyarakat serta menciptakan *Good Governance* di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

w.RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu Pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 mengacu pada Sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025. Dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini disusun secara bersinergi dan terintegrasi antara prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan berjangka waktu 1 (Satu) Tahun, sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berlatar belakang amanat dimaksud, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertugas membantu Bupati dalam Perumusan Kebijakan Daerah Terkait Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Nomor : 28 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai

Kartanegara. Dinas Ketahanan Pangan akan melaksanakan segenap proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dikuasainya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan dalam memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara baik dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanannya dengan harga yang terjangkau.

Mengingat begitu strategisnya peranan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara serta seiring untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu ”Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan bahagia”. Juga sejalan dengan Visi Badan Pangan Nasional yang telah ditetapkan yaitu ”Terwujudnya Tata Kelola Sistem Pangan yang Inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai Ketahanan Pangan yang berlandaskan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan”. Serta sesuai arah kebijakan Badan Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 ”Meningkatkan Tata Kelola sistem Pangan Nasional yang inklusif tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan melalui 3 (tiga) aspek (Ketersediaan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan)” maka Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai misi 2 Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya, maka perlu disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025.

Sebagai dokumen rencana Tahunan Perangkat Daerah, maka Renja Dinas Ketahanan Pangan mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan Tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Dinas Ketahanan Pangan merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari program Dinas Ketahanan Pangan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan.
2. Renja Dinas Ketahanan Pangan merupakan acuan Dinas Ketahanan Pangan untuk memasukkan program/kegiatan ke

dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program/kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun 2025.

3. Renja Dinas Ketahanan Pangan merupakan salah satu instrumen untuk evaluasipelaksanaan program/kegiatan Dinas Ketahanan Pangan yaitu untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan Tahunan pemerintah daerah,maka tahapan penyusunan dan penetapannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara PerubahanRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah.
3. Program/kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program/kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program/kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja keluaran (output), indikator kinerja hasil (outcome) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UUHKPD);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nonor 13);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerahsebagai tindak lanjut Undang-Undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan KeuanganDaerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-1317 Tentang Perubahan atas Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara, (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026.

20. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Nomor : 28 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata KerjaDinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara
21. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tanggal 5 Juli 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun anggaran 2023.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 mempunyai tujuan :

a. Memberikan acuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasarannya.
b. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara selama Tahun anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten KutaiKartanegara Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB. I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah agar subsantsi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunanRAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur SOTK,kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Organisasi Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah,serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB.II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

BAB.IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusanprogram dan kegiatan.
2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai denganrancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB.V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
c. Rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasisejauh mana kemampuan Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, serta hambatan danpermasalahan yang dihadapi. Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan Tahun2024.

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyusun Anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati bersama. Pada Tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan pada APBD perubahan dianggarkan sebesar Rp.26.269,272.863,00 dengan realisasi sebesar Rp. 24.582.064.568,00 atau 93,58%, dari total alokasi yang ada.

Pagu Dinas Ketahanan Pangan pada Tahun 2023 beserta realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 sebagaimana tabel 1 berikut :

Tabel 1 :

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (Nilai Sakip)	12.419.272.863,00	11.452.532.482,00	92,22
2.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras/Jagung) Sesuai Kebutuhan)	5.200.000.000,00	5.036.192.280,00	96,85
3.	Meningkatnya Skore Pola Panga Harapan	Konsumsi Energi dan protein Perkapita (Skore PPH Konsumsi)	8.650.000.000,00	8.093.339.806,00	93,56
		TOTAL	26.269.272.863,00	24.582.064.568,00	93,58

Evaluasi Hasil Pelaksanatan Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara serta Pencapaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat Tabel 2 (TC 29) sebagai berikut :

Tabel 2

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja-PD Tahun 2023	Realisasi Renja-PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 =(10/4)
1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
1	Bidang Ketahanan Pangan									
0,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	81	89,45	80	**89,45**	**111,81**	**81**	**89,45**	**110,43**
000.01.2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	80	42 Dokumen	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**100,00**	**13 Dokumen**	**55 Dokumen**	**68,75**
000.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**100,00**	3 Dokumen	**15 Dokumen**	**50,00**
000.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	25	15 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	**100,00**	5 Laporan	**20 laporan**	**80,00**
000.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25	15 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	**100,00**	5 Laporan	**20 laporan**	**80,00**
000.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	60	36 Dokumen	**12 Dokumen**	**12 Laporan**	**100,00**	**12 Laporan**	**48 Laporan**	**80,00**
000.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	270	162 Orang Bulan	54 Orang Bulan	54 Orang/bulan	**100,00**	56 Orang/bulan	**218 Orang/Bulan**	**80,74**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja-PD Tahun 2023	Realisasi Renja-PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 =(10/4)
000.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	60	36 Laporann	12 Laporan	12 Laporan	**100,00**	12 Laporan	**48 Laporan**	**80,00**
000.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	60	36 Dokumen	**12 Dokumen**	**12 Laporan**	**100,00**	**12 Laporan**	**48 Laporan**	**80,00**
000.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	36 Laporann	12 Laporan	12 Laporan	**100,00**	12 Laporan	**48 Laporan**	**80,00**
000.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	60	36 Bulan	12 Bulan	**12 Bulan**	**100,00**	**12 Bulan**	**38 Bulan**	**60,00**
000.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**10,00**	6 Paket	2 Paket	**2 Paket**	**100,00**	3 Paket	**9 Paket**	**90,00**
000.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**10 Paket**	8 Paket	4 Paket	**4 Paket**	**100,00**	2 Paket	**10 Paket**	**100,00**
000.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**15 Paket**	9 Paket	3 Paket	**3 Paket**	**100,00**	3 Paket	**12 Paket**	**80,00**
000.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**1250,00**	660 Laporan	160 Laporan	**160 Laporan**	**84,00**	250 Laporan	**1050 Laporan**	**56,80**
000.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**10.000,00**	5000 dokumen	1000 Dokumen	**1000 Dokumen**	**100,00**	2000 Dokumen	**7000 Dokumen**	**70,00**

000.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**	60	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**100,00**	**12 Bulan**	48 Bulan	**80,00**
000.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**100,00**	12 Laporan	48 Laporan	**80,00**
000.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	12 Laporann	4 Laporan	4 Laporan	**100,00**	12 Laporan	24 Laporan	**40,00**
000.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**100,00**	12 Laporan	48 Laporan	**80,00**
000.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang***	150	90 Unit	30 Unit	**24 Unit Roda 2, 6 Unit Roda 4**	**100,00**	**24 Unit Roda 2, 6 Unit Roda 4**	**96 Unit Roda 2, 24 Unit Roda 4**	80,00
000.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	6 Unit	2 Unit	2 Unit	**100,00**	2 Unit	8 Unit	80,00
000.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	140	85 Unit	29 Unit	29 Unit	**100,00**	28 Unit	113 Unit	80,71
2,9	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**									
2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	49	24 Unit	2 Unit	17 Unit	100,00	11 Unit	35 Unit	71,43
2.09.02.2.01	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**	*Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	49	24 Unit	13 Unit	13 Unit	100,00	11 Unit	35 Unit	71,43

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja-PD Tahun 2023	Realisasi Renja-PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 =(10/4)
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Terbangunnya Lumbung Pangan Masyarakat	16	7 Unit	3 Unit	3 Unit	100,00	3 Unit	10 Unit	62,50
2.09.02.2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Terbangunnya Lantai Jemur Lumbung Pangan masyarakat	28	12 Unit	8 Unit	8 Unit	100,00	6 Unit	18 Unit	64,29
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	5	5 Unit	2 Unit	2 Unit	100,00	2 Unit	7 Unit	140,00
2.09.02.2.01.05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Dokumen Penyusunan Pemetaan Infrasrtuktur pendukung kemendirian pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Kecukupan Konsumsi Energi Kecukupan Konsumsi Protein	2225 Kkal/Kap/Hari 57,25 Gram/Kap/Hari	1970 Kkal/Kap/Hari 61,4 Gram/Kap/Hari	2150 Kkal/Kap/Hari 57 Gram/Kap/Hari	1970 Kkal/Kap/Hari 61,4 Gram/Kap/Hari	91,63 107,09	1970 Kkal/Kap/Hari 61,4 Gram/Kap/Hari	1970 Kkal/Kap/Hari 61,4 Gram/Kap/Hari	91,63 107,09
2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Stabilitas Harga Pangan (Koefisien Variasi Harga Pangan / Beras)	5	<5	<5	4,5	111,11	5	5	100,00
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	10	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	2 Laporan	6 Laporan	60,00
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	10	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	2 Dokumen	6 Dokumen	60,00
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	5	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00	2 Unit	4 Unit	80,00
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Tersebar 18 Kecamatan**	250	308 Ton	300 Ton	308 Ton	102,67	150 Ton	300 Ton	200,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja-PD Tahun 2023	Realisasi Renja-PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 =(10/4)
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	250	308 Ton	300 Ton	308 Ton	102,67	150 ton	300 ton	200,00
	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	JumlahPemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	53 Ton	53 Ton	53 Ton	53 Ton	100,00	0	53 Ton	100,00
2.09.03.2.04	***Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi***	**Peningkatan Pembinaan Penganekaragaman Konsumsi pangan**	150 Kelompok	70 Kelompok	**35 Kelompok**	**35 Kelompok**	100,00			
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	1 Dokumen	5 dokumen	100,00
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	**150**	70 Laporann	35 Laporan	35 Laporan	100,00	**15 laporan**	**85 Dokumen**	**56,67**
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	5,00	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00	1 Dokumen Laporan	4 Dokumen	80,00
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan**	25,00	24 Desa	**5 Desa**	19 Desa	380,00	19 Desa	43 Desa	172,00
2.09.04.2.01	*Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan*	*Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan*	4,00	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	100,00	1 Dokumen	3 dokumen	75,00
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen Peta analisis Ketahanan dan kerentanan Pangan (Peta FSVA)	4,00	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	100,00	1 Dokumen	3 dokumen	75,00
2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Berkurangnya Jumlah Desa Yang Terindikasi Rawan pangan**	25,00	24 Desa	**5 Desa**	**19 Desa**	380,00	5,00	39 Desa	156,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja-PD Tahun 2023	Realisasi Renja-PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 =(10/4)
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	5	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00	1 Laporan	5 laporan	100
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25	24 Dokumen	5 Dokumen	19 Dokumen	380,00	15 Dokumen	39 Dokumen	156
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi**	95	95,35	91	95,35	104,78	91	95,35	**104,78**
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Terciptanya Keamanan Pangan Segar**	95	95,35	91	95,35	104,78	89,00	95,35	**107,17**
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	20 Dokumen	9 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	4 Dokumen	13 Dokumen	**65,00**
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk pangan segar yang difasilitasi untuk sertifikasi	4 Sertifikat	2 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	100,00	1 Sertifikat	3 Sertifikat	**75,00**
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	8 Dokumen	80,00
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pangan segar yang mendapat rekomendasi	20 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	4 Dokumen	16 Dokumen	80,00
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	4 dokumen	16 Dokumen	80,00

Dari hasil evaluasi terhadap tabel TC 29 diatas, diketahui bahwa masih terdapat program dan kegiatan yang masih belum memenuhi target kinerja/keluaran. Dan beberapa kegiatan capaian kinerjanya telah melebihi target yang di tetapkan, dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Dari 5 Program yang ada pada dinas ketahanan pangan terdapat satu Program yang belum mencapai target yang telah di tetapkan, yaitu :

   Program Peningkatan Diversifikasi Pangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat, untuk Indikator Kecukupan Konsumsi Energi masih belum tercapai, dari target yang ditetapkan sebesar dengan Indikator Angka Kecukupan Energi 2150 Kkal/Kap/Hari tercapai sebesar 1970 Kkal/Kap/Hari = 91,63%.

2. Dari 13 Kegiatan yang ada, terdapat satu kegiatan yang tidak tercapai target yang di tetapkan, yaitu kegiatan :

   - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota.

   Dari target yang ditetapkan sebanyak 49 Unit sampai dengan akhir periode Renstra baru tercapai sebanyak 35 Unit, untuk itu perlu dilakukan Percepatan dan penambahan Anggaran untuk dapat merealisasikan target sampai dengan akhir periode Renstra.

3. Dengan tidak tercapainya target Tahunan yang ditetapkan, maka harus dilakukan percepatan pencapaian target pada Tahun anggaran berikutnya.

4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tidak tercapainya target, adanya penganggaran untuk memberikan sosialisasi secara lebih luas tentang konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, seimbang dan Aman), serta tambahan anggaran untuk penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Untuk Pembangunan Lumbung Pangan dan lantai jemur.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023, Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahaan Pangan telah ditentukan target dan cara pengukurannya sebagaimana tabel 3 berikut ini :

Tabel 3 : Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78	Total Skore Hasil penilaian Dari Tim Inspektorat Kabupaten
Meningkatkan Ketersediaan Pangan Daerah	1. Persentase Ketersediaan pangan utama (Beras/ Jagung sesuai kebutuhan)	Persen	130	Jumlah Pangan yang tersedia dibagi (Jumlah Penduduk x Kebutuhan Perkapita PerTahun)x 100%
	2.Skore Pola pangan harapan Ketersediaan	Score	97,89	Dihitung menggunakan data ketersedian energi 11 kelompok bahan makanan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang dikelompokan kembali menjadi 9 kelompok dalam perhitungan PPH untuk dikonsumsi oleh penduduk/ masyarakat.
	3. Ketersediaan Energi dan Proten Perkapita			Dihitung Melalui Perhitungan Neraca Bahan Makanan
	- Ketersediaan Energi	Kkal/kap/ hari	2378	
	- Ketersediaan Protein	Gram/kap/ hari	79,81	
Meningkatnya Skore Pola Pangan Harapan	Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skore PPH) Konsumsi.	Skore	84	Total skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dikenal dengan kualitas konsumsi pangan adalah jumlah dari skor 9 kelompok pangan, yaitu jumlah dari kelompok padi-padian sampai dengan skor kelompok lain-lain

Hasil Pengukuran capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, masih terdapat indikator Kinerja Utama yang belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu :

- Persentase Ketersediaan pangan utama (Beras/ Jagung sesuai kebutuhan) dari Target yang ditetapkan sebesar 130% tercapai 118,46
- Skore Pola Pangan Harapan Ketersediaan, dari target yang ditetapkan sebesar 97,89 tercapai 92,83

Meskipun ada Indikator yang tingkat Capaian Kinerjanya masih di bawah 100 dalam arti Target Kinerja tidak tercapai, tetapi Tingkat Capaian kinerja sudah termasuk dalam kategori Baik (diatas 90%). Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel.4 dibawah ini.

Tabel 4. Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (Nilai SAKIP)	Nilai	77	74,28	96,47	78	88,89	113,96	Meningkat
Meningkatkan Ketersediaan Pangan Utama (beras)	Persentase Ketersediaan pangan utama (Beras/ Jagung sesuai kebutuhan)	Persen	129	118	91,47	130	118,46	91,12	Menurun
	Skore Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Skore	96,48	93,66	97,08	97,89	92,83	94,83	Menurun
	Ketersediaan energi dan protein Perkapita								
	- Ketersediaan Energi	Kkal/ Kap /Hari	2372	2458	103.63	2378	2779	116,86	Meningkat

	Ketersediaan Protein	Gram / Kap/Hari	79,42	115	144,80	79,81	104,4	130,81	Menurun
Meningkatkan Penanganan Daerah Rawan pangan	Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan Prioritas I	Desa	5	5	100	5	44	880	Meningkat
Penguatan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi (Persen)	Persen	90,77	95,35	104,78	91	98	107,69	Meningkat
Meningkatnya Skore Pola Pangan	Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skor PPH Konsumsi)	Skore	82	84,5	103,05	84	88,46	105,31	Meningkat

Pengukuran kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang pada tabel di atas. Pada akhir Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan sebagaimana tabel diatas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Ketersediaan Pangan Utama (beras)
    1) Persentase Ketersediaan pangan utama (Beras/ Jagung sesuai kebutuhan)

       Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 mencapai 118,46% dari kebutuhan pangan seluruh penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara, masih ada kelebihan sebanyak 18,46% dari

kebutuhan.Pada Tahun 2023 Target Indikator Ketersediaan Pangan Utama sebesar 130% tercapai sebesar 118,46% dengan persentase capaian sebesar 91,12%

Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2022 untuk ketersediaan pangan utama mengalami kenaikan sebesar 0,46% dimana capaian kinerja pada Tahun 2022 sebesar 118%

2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

Capaian indikator kinerja Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan di masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 97,89. Sampai dengan akhir Tahun 2023 tercapai sebesar 92,83 dengan tingkat Capaian kinerja sebesar 94,86%.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2022, mengalami penurunan sebesar 2,22%, dimana pada Tahun 2022 capaian kinerja sebesar 97,08%.

2. Meningkatnya Score Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Tahun 2023 sebesar 88,46 dari target Tahun 2023 sebesar 84,00 atau dengan capaian sebesar 105,31%.

Secara Rinci Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Tahun2023 dapat dilihat pada Tabel T-C 30 (Tabel 5) berikut ini :

Tabel 5

Tabel : T-C. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Prosentase Ketersediaan pangan utama Beras (%)			129,00	130,00	134,00	137,00	140,00	118,00	118,46	118,00	118,00	Indikator Sasaran, ada Kecenderungan tidak tercapai Target, karena penetapan target di awal terlalu Tinggi. Rata2 Tercapainya Target Hanya 118
2	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan)			96,48	97,89	98,59	99,30	100,00	93,66	92,83	92,83	92,83	Indikator Sasaran, ada Kecenderungan tidak tercapai Target, karena penetapan target di awal terlalu Tinggi. Rata2 Tercapainya Target Hanya kisaran 92 - 93
3	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita :												Indikator Sasaran
	- Ketersediaan Energi			2372,00	2378,00	2458,00	2458,00	2458,00	2458,00	2779,00	2700,00	2700,00	
	- Ketersediaan Protein			79,42	79,84	115,00	115,00	115,00	115,00	104,40	104,00	104,00	
4	Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skore Pola pangan harapan PPH Konsumsi)			82,00	84,00	86,00	88,00	88,00	84,50	88,46	88,00	88,00	Indikator Sasaran, Untuk Skore PPH Meskipin Belum Ideal Cenderung Meningkat Tiap tahun
5	Cakupan sarana dan Prasarana Pendukung Kemandirian pangan			9,00	10,00	20,00	20,00	20,00	17,00	13,00	11,00	20,00	Indikator Program
6	Kecukupan Konsumsi Energi dan Protein												
	- Kecukupan Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)			2050,00	2150,00	2175,00	2200,00	2200,00	1933,00	1970,00	1970,00	1970,00	Indikator Program, Kecukupan Konsumsi Energi Cenderung tidak Tercapai Target yang ditetapkan, yang
	- Kecukupan Konsumsi Protein (gram/kap/hari)			55,50	57,00	57,10	57,20	57,20	56,80	61,40	60,00	60,00	Indikator Program
7	Penaganan Kerawanan Pangan Pada Daerah Yang Terindikasi Rawan Pangan			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	44,00	45,00	45,00	Indikator Program
8	Cakupan Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan yang aman dikonsumsi (%)			90,77	91,00	95,00	95,00	95,00	95,35	95,35	95,35	95,35	Indikator Program

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

1. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara

   Pembagunan Pangan merupakan salah satu faktor kunci dalam Pembangunan suatu bangsa. Dalam rangka mewujudkan ketahananpangan Nasional, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019, dinyatakan bahwa Ketahanan Pangan Merupakan Urusan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar. Pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dengan Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Ketahanan Pangan.

   Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelayanan, maka dilakukan penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan.

   Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka diperlukan penyesuaian penyesuaian terhadap Program dan Kegiatan dalam pembangunan ketahanan pangan.

2. Permasalahan dan Hambatan yang di hadapi Dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara. Permasalahan utama pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Belum Optimalnya ketersediaan pangan dengan Score PPH Ketersediaan yang belum sesuai harapan, serta Kecukupan Konsumsi Enegi yang masih belum ideal. Permasalahan tersebut disebabkan :

a. Sarana dan Prasarana pendukung Kemandirian Pangan Masih belum Memadai terutama apabila dihadapkan dalam rangka mempersiapkan Kutai Kartanegara sebagai Penyangga IKN.

b. Konsumsi Pangan Masyarakat masih belum Beragam Bergizi dan seimbang. Masih tingginya konsumsi beras perkapita, serta masih kurangnya konsumsi Buah dan sayur, karena Perilaku masyarakat Kabupaten Kutai Kertanegara yang masih cenderung sulit merubah pola makan ketergantungan akan beras ke (Pangan Alternatif).

c. Adanya keterbatasan kemampuan pengembangan sumber pangan lokaldan pengolahan bahan pangan local sebagai sumber pangan alternatif.

d. Pengetahuan akan diversifikasi konsumsi pangan (penganekaragaman konsumsi pangan) yang masih rendah, karena kurangnya sosialisasi, promosi dan advokasi dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui media yang bisa digunakan.

e. Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan dan kelompok masyarakat rawan pangan belum optimal. Belum adanya sinergitas kinerja diantara PD terkait dalam upaya penanganan kerawanan pangan, yang terdiri dari 6 Indikator kerawanan pangan sesuai peta FSVA (Akses Jalan, Akses air Bersih, Penyediaan Sarana dan Prasarana (Toko/Warung), Tenaga Kesehatan, Pemberdayaan/ Penanganan Penduduk Tidak Sejahtera, Lahan Pertanian).

f. Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap keamanan pangan, terutama pangan segar, sehingga masih terdapat produk pangan segar yang tidak aman untuk dikonsumsi.

3. Visi Misi Bupati Kutai Kartanegara

Sebagaimana Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegra Tahun 2021-2026 dengan Visinya “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Bahagia”, Dalam hal ini urusan Ketahanan Pangan berperan untuk mendukung misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang

Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya. Misi tersebut diintegrasikan kedalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan untuk mendukung pencapaian visi misi Bupati.

4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Perangkat DaerahBeberapa hal yang menjadi tantangan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diantaranya :
   a. Sarana dan Prasarana Kemandirian Pangan dalam Mendukung ketersediaan Pangan masih belum optimal, masih belum tersedianya Peta jalan tentang sarana pendukung kemandirian Pangan.
   b. Penanganan daerah rawan pangan dan rentan rawan pangan dengan berbagai penyebab yang bervariasi, yang berpengaruh pada ketersediaan pangan. Penanganan daerah rawan pangan memerlukan intervensi berupa tindakan pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis secara tepat dan cepat. Rawan pangan kronis memerlukan intervensi jangka menengah dan panjang, sedangkan rawan transien memerlukan intervensi jangka pendek tanggap darurat yang bersifat segera.
   c. Stabilsasi Pasokan dan Harga Pangan.
      UU 23/2014 mengamanatkan pada Pemerintah dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah. Dalam rangka mewujudkan stabilitas pangan, tantangan ke depan adalah memperkuat kapasitas produksi pangan lokal yang memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjamin, serta dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan konsumen. Dengan memenuhi syarat pemasaran tersebut, maka daya saing produk pangan akan lebih baik. Namun sebaliknya, bila produk lokal tidak mampu memenuhi syarat kualitas, kontinuitas dan kuantitas yangdiminta, maka akan diisi oleh produk sejenis yang berasal dari impor.
   d. Kebutuhan Pangan untuk Kesehatan Masyarakat modern yang peduli Kesehatan.

Untuk memperoleh produk pangan yang bermutu baik dan terjamin bagi kesehatan, tidak cukup hanya mengandalkan pengujian akhir di laboratorium saja, tetapi juga diperlukan adanya penerangan pengendalian dan pengawasan dalam sistem jaminan mutu keamanan pangan.

Dalam pelaksanaan Produksi Pangan Segar harus didorong dengan sistem yang aman sehingga produk Pangan Segar yang aman dikonsumsi.

Jaminan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Diterbitkannya Permentan Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan), yaitu bahwa produk PSAT yang diperdagangkan dalam bentuk kemasan harus memiliki nomor register. Hal tersebut menjadi tantangan Dinas Ketahanan Pangan untuk meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan dalam hal sertifikasi jaminan mutu keamanan pangan. Terutama dalam rangka Kukar sebagai Lumbung Pangan Kaltim sebagai Penyangga IKN.

e. Kebiasaan masyarakat dalam Konsumsi Pangan yang masih belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman, kecenderungan memenuhi Konsumsi Energi dari Sumber Pangan Beras, dan belum bisa beralih ke sumber pangan alterlatif berbasis Sumber Daya Lokal yang harganya Relatif lebih mahal dari pada mengkonsumsi Beras.

Selain tantangan, Dinas Ketahanan Pangan memiliki beberapa peluang yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan urusan pangan, yaitu :

1. Masih tersedia sumber daya alam yang belum termanfaatkan secara optimal untuk pengembangan dan penganekaragaman pangan local.
2. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, serta organisasi masyarakat, Kelompok Wanita, yang memudahkan untuk sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran akan pangan beragamberigizi, seimbang dan aman (B2SA).

3. Pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pangan menjadi peluang dalam meningkatkan ketersediaan pangan, mengembangkan sistem distribusi pangan yang efisien dan meningkatkan kualitas maupun keragaman produk pangan.
4. Potensi pangan yang sangat besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas di pedesaan dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman;
5. Masih terbuka peluang pengembangan usaha dan Pengolahan Pangan Lokal yang belum dikelola dengan baik.
6. Isu – Isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun yang direncanakan.

Dari uraian singkat sebagaimana tersebut di atas isu-isu strategis yang harus ditindaklanjuti yang menjadi bagian tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dirumuskan sebagai berikut :

1) Di Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan peta FSVA Tahun 2023, untuk Prioritas 2 dan 3 sebanyak 21 Desa. Kondisi ini sudah lebih Baik dari Tahun sebelum. Beberapa faktor penyebab, belum terpenuhinya infrastruktur dasar pedesaan (Jalan), potensi sumber daya yang kurang memadai, belum adanya sarana air Bersih, Kurangnya Tenaga Kesehatan, Masih terdapat keluarga Prasejahtera. Masih kurangnya sinergisitas dan kolaborasi pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Karena Kerawanan Pangan tidak bisa diselesaikan secara Parsial.

2). Konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian masyarakat masih belum sesuai dengan standar yang dala Widyakarya Pangan Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). Kondisi ini bukan berarti kekurangan Pangan, tetapi masih kurangnay keberagaman Konsumsi Pangan yang akan tercermin dalam angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas.

3) Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Saat ini masih terdapat penggunaan bahan kimia yang melebihi ambang batas, masih ditemukannya pangan segar yang mengandung bahan kimia melebihi batas minimal residu (BMR). Akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen pangan Segar Asal Tumbuhan akan bahaya penggunaan Bahan kimia yang melebihi batas minimal Residu (BMR).

Masih sangat sedikit Produk Pangan Segar (Beras) yang sudah tergistrasi, dan produk pangan segar yang sudah bersertifikat juga masih sangat sedikit.

4) Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Kemandirian pangan, masih perlunya Ketersediaan Lantai jemur dalam meningkatkan kualitas Produksi Pangan dalam Pengeringan, Serta Lumbung Pangan Masyarakat yang masih belum sesuai dengan Kebutuhan. Masih diperlukan pemetaan Kebutuhan Sarana Pendukung Kemandirian Pangan

5) Informasi Harga, Rantai Pasok, Jaringan Distribusi Pangan

Isu ini diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak hargadan gangguan akses pangan. Stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

Belum memadainya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan, sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting. Mengingat sarana dan prasarana distrbusi merupakan jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 merupakan rancangan program kegiatan Renja satu Tahun yaitu Tahun 2024. Dalam Penyusunan Rencana Kerja ini dilakukan perkiraan kebutuhan. Setelah dilakukan reviuw dan analisa kebutuhan,terdapat perubahan kondisi yang mengharuskan adanya penyesuaian terhadap rencana yang tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 -

2026. Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sesuai dengan dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari 5 (Lima) program dan 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp10.877.786.621,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).

Setelah dilakukan reviu dan analisa maka rancangan akhir Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 sesuai dengan kebutuhan menjadi 5 (Lima) program dan 15 (Lima Belas) kegiatan dan 54 (Lima Puluh Empat) subkegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp76.120.164.434,00 (Tujuh Puluh Enam Milyar Seratus Dua Puluh Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Empat ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

Penyesuaian Rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dilakukan untuk dapat mengakomodir Kepentingan Masyarakat, untuk pembayaran Gaji dan tunjangan ASN, Fasilitas Penunjang Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten Kota Berupa sub kegiatan untuk penunjang penyelenggaraan Satu Data Indonesia, Pengadaan Kendaraan Dinas, pengadaan Mebeler, Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai, serta untuk menunjang pelaksanaan Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan agar dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Beberapa hal yang menyebabkan adanya penyesuaian Rancangan awal Renja Dinas Ketahanan Pangan, diantaranya karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya penyesuaian Anggaran Gaji ASN sesuai dengan hasil rekonsiliasi Gaji dengan BPKAD karena kenaikan Gaji Pegawai dan Mutasi Pegawai masuk ke Dinas Ketahanan Pangan
2. Untuk Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kutai Kartanegara pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Serta Sub Kegiatan dalam rangka Administrasi Barang Milik Daerah
3. Untuk menunjang Sarana Pendukung Program penunjang Urusan Kabupaten Kota yaitu Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia,

Peningkatan Disiplin ASN dengan Pengadaan pakaian Dinas. Serta Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah berupa Pengadaan Mobil Jabatan Pejabat Eselon 3, Pengadaan Mebel dan Penataan Interior Ruangan Kerja.

4. Penambahan Sub Kegiatan dan anggaran dalam rangka Rencana Aksi Penurunan Stunting sesuai yang telah di masukkan dalam Aksi Bangda Kementrian Dalam Negeri
5. Anggaran Untuk Menunjang Tugas Fungsi dinas Ketahanan Pangan dalam rangka stabilisasi harga Pangan untuk Pengendalian Inflasi

Secara Lengkap dapat dilihat dalam Tabel 6 Matrik TC 31 sebagai berikut :

Tabel 6

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

DINAS KETAHANAN PANGAN

(TC-31)

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**KAB KUKAR**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**79,00**	**7.637.786.621,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**KAB KUKAR**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**79**	**14.077.104.434,00**	
000.01.2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**KAB KUKAR**	**Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**16 Dokumen**	**350.000.000,00**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**KAB KUKAR**	**Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**13 Dokumen**	**1.000.000.000,00**	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB KUKAR	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	200.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB KUKAR	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	450.000.000,00	Pengalokasian termasuk mengikuti Musrenbang Kecamatan dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, serta Mengikuti Rapat Koordinasi dengan Provinsi dan Pusat (APBN dan DAK, APBD Prov dan Bantuan Keuangan) Pagu Awal 80.000.000 menjadi 150.000.000, Fasilitasi untuk Rapat koordinasi internal dan eksternal dalam Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 Pagu Awal 20.000.000 menjadi 50.000.000, penyusunan Renstra 2025-2030 dengan subtansi isi mengkaji
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	50.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	50.000.000,00	
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	100.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	150.000.000,00	Kegiatan Untuk Melaksankan Analisis permasalahan capaian kinerja melalui hasil E Pantau Tri Wulan 1,2,3 ,4 dan Laporan Akhir P(agu Awal 100.000.000 menjadi 150.000.000
2.09.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	KAB KUKAR	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	0	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	KAB KUKAR	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Sub Kegiatan Baru) Untuk Pemenuhan Satu Data Indonesia Kutai Kartanegara
2.09.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral daerah	KAB KUKAR	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	0	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral daerah	KAB KUKAR	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	250.000.000,00	Untuk Pemenuhan Dokumen Pada Satu Data Indonesia Kukar. atau Data (BECIK) - Kecamatan sebagai pusat data (operasional, Honorarium, Peralatan, pendampingan teknis) (Sub Kegiatan baru)
2.09.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	KAB KUKAR	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	0	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	KAB KUKAR	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000,00	Untuk Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renja Tahun 2026, dan Penyusunan Renstra Tahun 2025 - 2029
2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**KAB KUKAR**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**12 Laporan**	**6.303.737.861,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**KAB KUKAR**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**12 Laporan**	**8.626.795.674,00**	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KAB KUKAR	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	6.223.737.861,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KAB KUKAR	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	8.466.795.674,00	Mengikuti hasil perhitungan tahun 2024 untuk mengantisipasi kenaikan Gaji dan Perpindahan Pegawai sebagaimana yang terjadi tahun 2024
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (sub kegiatan baru)

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	80.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	110.000.000,00	Diusulkan sama dengan anggaran tahun 2024, karena anggaran 80 Juta sesuai Ranwal tidak mencukupi untuk membayar Honor PA dan lainnya. Penambahan Untuk Mengcover Honor PA, dan PPTK Kegitan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang belum sesuai standar
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KAB KUKAR	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KAB KUKAR	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Sub Kegiatan Baru)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**KAB KUKAR**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**12 Berkas**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**KAB KUKAR**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**12 Dokumen**	**105.000.000,00**	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	25.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan baru)
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	50.000.000,00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan baru)
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	40.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	30.000.000,00	Untuk Penyusunan Laporan Rekonsiliasi BMD pada Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**KAB KUKAR**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**6 Dokumen**	**-**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**6 Dokumen**	**416.260.000,00**	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	KAB KUKAR	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	KAB KUKAR	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	170 Paket	166.260.000,00	Usul Penambahan Anggaran untuk Pengadaan Baju Dinas (Batik/Korpri, Baju Miskat). Anggaran ini diajukan karena Pada Dinas Ketahanan Pangan masih belum pernah pengadaan Pakaian Dinas dimaksud, sehingga terkesan tidak ada disiplin karena baju yang dipakai beraneka ragam.
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	KAB KUKAR	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	KAB KUKAR	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000,00	Anggaran diusulkan sama dengan Tahun 2024, karena banyaknya Informasi Kepegawaian yang harus dilaksanakan oleh Perangkat daerah melalui Sistem Informasi Kepegawaian
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	KAB KUKAR	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	KAB KUKAR	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25	200.000.000,00	Anggaran diusulkan dalam rangka peningkatan Kapasitas SDM, dalam rangka memenuhi kewajiban 20 Jam Pelatihan untuk setiap ASN. Serta Untuk Peningkatan Kapasitas Petugas Keamanan Pangan di Tiga Wilayah (Hulu, Tengah, dan Pantai)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**KAB KUKAR**	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**350.000.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**KAB KUKAR**	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**450.000.000,00**	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB KUKAR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	55.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB KUKAR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	55.000.000,00	Untuk Pengadaan Kertas dan Alat Tulis Kantor lainnya dalam menunjang administrasi perkantoran
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KAB KUKAR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KAB KUKAR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	Pembelian Makan Minum Rapat dan bahan Logistik lainnya
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KAB KUKAR	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	20.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KAB KUKAR	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Perubahan target dari 3 Paket (Kertas Kop, Map dan Penggandaan menjadi 1 Paket (Cetak Map dan Penggandaan)

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	150.000.000,00	Untuk Membiayai Pelaksanaan Perjalanan Dinas di dalam dan Luar Daerah
2.09.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2000 Dokumen	75.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2000 Dokumen	75.000.000,00	
2.09.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	Semua urusan menggunakan aplikasi, diperlukan tambahan anggaran dalam rangka pengembangan website Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	KAB KUKAR	**Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**KAB KUKAR**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan**	**104 Unit**	**2.845.000.000,00**	
2.09.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KAB KUKAR	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KAB KUKAR	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	945.000.000,00	Diusulkan Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Untuk Kepala Bidang (3 Bidang), mengingat kendaraan yang ada sudah tidak layak pakai.
2.09.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KAB KUKAR	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KAB KUKAR	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	400.000.000,00	Mobil Caroseri pendukung distribusi bahan makanan pokok di kecamatan dalam Rangka Pengendalian inflasi
2.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	KAB KUKAR	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			Pengadaan Mebel	KAB KUKAR	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	700.000.000,00	Anggaran ini diusulkan mengingat kondisi mebeler pada Dinas Ketahanan Pangan sudah tidak representatif, Mebel untuk Ruang rapat, Kursi Kerja serta lemari untuk pendukung dalam penataan arsip yang sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan.
2.09.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KAB KUKAR				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KAB KUKAR	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket (Ruangan)	800.000.000,00	Penataan Ruangan Kantor agar lebih representatif dalam Melaksanakan Tugas Fungsi Organisasi (Rehab Ruang kantor) 'Ruang Kerja Bidang Distribusi, Ruang Kerja Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Ruang Kerja Bidang Konsumsi Pangan, Ruang Kerja Biang Keamanan Pangan, Ruang Kerja Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, Ruang Kerja Sekretariat (Sub Bagian Umum, Kepegawaian) Ruang Rapat, Ruamg Untuk Penyusunan Arsip, Ruangan Tunggu Tamu, Ruang Untuk Penyimpanan Barang (ATK dll),
2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah**	**KAB KUKAR**	**Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**	**12 Bulan**	**559.048.760,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah**	**KAB KUKAR**	**Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**	**12 Bulan**	**559.048.760,00**	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	Pembayaran Rekening Internet Tahun 2025
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	15.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	30.000.000,00	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	514.048.760,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	499.048.760,00	Pembayaran Tenaga Honor sebanyak 25 Orang
2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**KAB KUKAR**	***Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara***	**24 Unit Roda 2, 6 Unir Roda 4**	**75.000.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**KAB KUKAR**	***Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara***	**28 Unit**	**75.000.000,00**	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KAB KUKAR	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	2 Unit Roda 4	25.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KAB KUKAR	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	2 Unit	25.000.000,00	Pemeliharaan Mobil Jabatan sebanyak 2 Unit (Bahan Bakar dll)
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KAB KUKAR	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit Roda 2 dan 4 Unit Roda 4	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KAB KUKAR	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	50.000.000,00	Pemelihraan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Pembayaran Pajak (STNK)
2,9	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**					
2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**KAB KUKAR**	**Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**	**2 Unit**	**750.000.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Kab. Kukar**	**Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**	**20 Unit**	**46.100.000.000,00**	
2.09.02.2.01	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**	**KAB KUKAR**	**Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**4 Unit**	**750.000.000,00**	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**	**KAB KUKAR**	**Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**20 Unit**	**46.100.000.000,00**	
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Desa Sidomulyo Kec. Tabang	Jumlah Lantai Jemur Lumbung Pangan masyarakat	2 Unit	200.000.000,00	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	LANTAI JEMUR BIASA : Kec. Tenggarong (Kel Mangkurawang dan Bukit Biru), Kec. Loa Kulu (Desa Sungai Payang), Kec. Marang Kayu (Desa Sebuntal), Kec. Muara Kaman (Desa Bunga Jadi); LANTAI JEMUR UV : Kec. Sebulu (Desa Manunggal Daya), Kec. Tenggarong Seberang (Desa Karang Tunggal), Kec. Tenggarong (KeluraHAN Loa Ipuh, Maluhu dan Bukit Biru); RICE MILLING UNIT : Kec. Tenggarong (Kel Mangkurawang, Bukit Biru), Kec. Loa Kulu (Desa Sungai Payang, Loh Sumber), Kec. Marang Kayu (Desa Sebuntal), Kec. Muara Kaman (Desa Cipari Makmur, Benua Puhun, Bunga Jadi), Kec. Loa Janan (Desa Loa Duri Ulu); LANTAI JEMUR PORTABEL : Kec. Sebulu (Desa Tanjung Harapan, Segihan, Sebulu Modern), Kec. Tenggarong (Kelurahan Bukit Biru), Kec. Anggana (Desa Sidomulyo), Kec. Muara Kaman (Desa Bunga Jadi, Desa sidomukti), Kec. Loa Kulu (Desa Sumber Sari), dan Pembangunan KPT di Desa Sumbersari, Karang Tunggal dan Cipari Makmur	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia	5 Unit lantai Jemur Biasa, 5 Unit Lantai Jemur UV, 10 unit Rmu dan 50 Unit Lantai Jemur Portabel, dan 1 Paket Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu	40.700.000.000,00	Usulan tambahan anggaran untuk Pembangunan Lantai jemur UV, lantai Jemur Biasa, Lantai Jemur Portabel dan Rice Milling Unit (RMU) dimaksudkan untuk meningkatkan mutu hasil produksi pertanian (terutama untuk pengeringan) hasil pertanian, dalam rangka menunjang pembangunan pertanian Berbasis kawasan, serta untuk
2.09.02.2.01.05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	KAB KUKAR	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	1 Dokumen	50.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisai Penyediaan Infrastruktur Logistik	KAB KUKAR	Jumlah Koordinasi dan Sinkronissi dalam Rangka Penyediaan Infrasttuktur Logistik.	2 Dokumen	400.000.000,00	Kegiatan Ini diperlukan dalam Koordinasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan (Penyusunan Peta Kebutuhan Infrastruktur Kemandirian Pangan) dan Prognosa Neraca Pangan
2.09.02.2.01.06	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Desa Sidomulyo Kec. Tabang	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	1 Unit	500.000.000,00	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kecamatan Tenggarong (Kel Mangkurawang dan Bukit Biru), Kecamatan Loa Kulu (Desa Sungai Payang), Kecamatan Marang Kayu (Desa Sebuntal), Kecamatan Muara Kaman (Desa Bunga Jadi.	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kota yang tersedia	5 Unit	5.000.000.000,00	Untuk Mendukung Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan Paket Pembangunan Bangunan Lumbung Pangan masyarakat sebanyak 5 Unit Unit
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Tersebar 20 Kecamatan**	**Kecukupan Konsumsi Energi**	**2.175,00**	**1.650.000.000,00**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Tersebar 18 Kecamatan**	**Kecukupan Konsumsi Energi**	**2.175,00**	**12.043.060.000,00**	
			Kecukupan Konsumsi Protein	**57,100**				**Kecukupan Konsumsi Protein**	**57,100**		
2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Tersebar 20 Kecamatan**	**Stabilitas Harga Pangan (Koefisien Variasi Harga Pangan / Beras)**	**5**	**225.000.000,00**	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Tersebar 18 Kecamatan**	**Stabilitas Harga Pangan (Koefisien Variasi Harga Pangan / Beras)**	**5**	**7.130.460.000,00**	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia					Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Desa Cipari makmur kec Muara Kaman dan Desa Manunggal Jaya Kecamatan tengarong Seberang	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	2 Unit	300.000.000,00	Kegiatan Diperlukan dalam Rangka menjaga Stabilitas Harga Pangan dan Pasokan Stoc Pangan. Penguatan Bantuan berupa bahan pangan Pokok dalam Rangka Mencegah terjadinya kelangkaan Pangan dan Menjamin Kelancaran Distribusi Pangan melalui Toko Tani Indonesia.
2.09.03.2.01.07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	KAB KUKAR	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	KAB KUKAR	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	150.000.000,00	Kegiatan Untuk mendukung Aksi Penurunan Stunting dan Masuk dalam aksi Bangda Dalam Percepatan Penurunan Stunting melalui Pembinaan Keluarga dalam Peningkatan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.08	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	TENGGARONG SEBERANG	Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	TENGGARONG SEBERANG	Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	7 Laporan	6.030.460.000,00	Usulan Tambahan anggaran untuk Sub Kegiatan baru, Untuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Pangan Murah dan Peringatan Hari Pangan Seluruh Dunia, Serta Untuk Gerakan menanam Cabe dalam rangka pengendalian Inflasi di Kabupaten Kutai Kartanegara
2.09.03.2.01.09	Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber daya Lokal			Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	4 Laporan	300.000.000,00	Kegiatan Untuk mendukung Aksi Penurunan Stunting dan Masuk dalam aksi Bangda Dalam Percepatan Penurunan Stunting, melalui Pembinaan UMKM Pangan Lokal dalam Pengembangan Usaha = Berupa Pelatihan Pengembangan Olahan Pangan Lokal B2SA) Bagi UMKM dan bantuan Alat Pengolahan Pangan Lokal
2.09.03.2.01.10	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	TENGGARONG SEBERANG	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	1 Unit	100.000.000,00	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1 Unit	100.000.000,00	Pembinaan Gapoktan/Poktan sebagai Lembaga Distribusi Pangan (Bantuan Modal Untuk Gapoktan Berupa gabah Kering Giling
2.09.03.2.01.12	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	KAB KUKAR	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	2 Dokumen	50.000.000,00	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Kembang Janggut, Kota Bangun, Sebulu, Tenggarong, Loa Janan, Muara Badak, Samboja	Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	150.000.000,00	Laporan Harga pangan sebagai bahan untuk mengetahui potensi terjadinya Inflasi, melalui Pemantauan harga dilakukan secara Mingguan (setiap hari Rabu pagi) selama 12 bln (Jan-Des). Honor enumerator thn ini hanya tersedia 6 bln untuk 1 orang saja. Penambahan anggaran untuk: tambahan honor enumerator, SPPD panggil rapat koordinasi dari Petugas Kecamatan.
2.09.03.2.01.16	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	KAB KUKAR	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Dokumen	75.000.000,00	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	KAB KUKAR	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	100.000.000,00	Usulan Tambahan Anggaran untuk meningkatkan kualitas Laporan dengan menyediakan data yang lebih lengkap dan akurat, meliputi Dokumen Ketersediaan Pangan, Ketersediaan Energi, Protein dll
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Tersebar 20 Kecamatan**	**Penguatan Cadangan pangan Pemerintah**	**50 Ton**	**600.000.000,00**	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersebar 18 Kecamatan	Penguatan Cadangan pangan Pemerintah	**150 Ton**	**2.000.000.000,00**	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersebar 20 Kecamatan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Ton	600.000.000,00	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersebar 18 Kecamatan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Ton	2.000.000.000,00	Sesuai dengan Rekomendasi BPKP dalam evaluasi Cadangan Pangan, maka harus menyediakan Cadangan Pangan sesuai dengan rumus hitungan yang ada di Permentan No 11 Tahu 2018 Disamping itu juga dalam sebagai kegiatan Pengendalian inflasi. Pengadaan Beras Untuk Cadangan Pangan dan Penyaluran sesuai kebutuhan (Pengadaan Beras Cadangan Pangan 150 Ton = Rp.1.800.000.000,-., Biaya Distribusi Rp. 200.000.000,00

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Tersebar 20 Kecamatan**	**Peningkatan Pembinaan Penganekaragaman Konsumsi pangan**	**30 Kelompok**	**825.000.000,00**	*Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi*	Tersebar 18 Kecamatan	Peningkatan Pembinaan Penganekaragaman Konsumsi pangan	**30 Kelompok**	**2.912.600.000,00**	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	KAB KUKAR	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2 Dokumen	150.000.000,00	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	KAB KUKAR	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan Dokumen Direktori Konsumsi Pangan dalam Rangka Peningkatan Skore Pola Pangan Harapan
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Muara Kaman , Sebulu, Muara Muntai,Kota Bangun, Kenohan , Kembang Janggut, Tabang, Marang Kayu, Anggana,dan Tenggarong	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	15 Laporan	600.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	20 Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	32 Laporan	2.687.600.000,00	Bantuan Saprodi untuk 9 Kelompok Wanita (PKK dan dasawisma), Gerakan Makan Telor dan Minum Susu Untuk Anak Sekolah SD dalam Rangka Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan, Pelatihan Pengolahan Pemanfaatan Pangan Lokal berupa Pelatihan pembuatan madu Analog, Sosialisasi dan Pemberian Menu B2SA Kepada Balita Usia Dua Tahun (BADUTA) Kader Posyandu untuk Pencegahan Stunting, Pondok Pangan Etam Untuk penanggu-langan Kemiskinan serta Pembinaan Peserta Festival pangan Lokal
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	KAB KUKAR	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	4 Laporan	75.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Samboja, Muara Jawa, Marang Kayu, Muara Badak	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	4 Laporan	125.000.000,00	Pembinaan dan Evaluasi Konsumsi Pangan
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**KAB KUKAR**	**Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan**	**5 Desa**	**500.000.000,00**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan**	**KAB KUKAR**	**19 Desa**	**2.750.000.000,00**	
2.09.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**KAB KUKAR**	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		**100.000.000,00**	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	KAB KUKAR	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	**1 Dokumen**	**250.000.000,00**	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	KAB KUKAR	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	2 Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	KAB KUKAR	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	250.000.000,00	Peta Rawan Pangan Sebagai Dasar Untuk Intervensi Penanganan Rawan Pangan (penanggulangan Kemiskinan). Penyusunan Peta Rawan pangan (Peta FSVA) Kab Kutai Kartanegara untuk Mengetahui Daerah yang terindikasi Rentan Rawan pangan. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis wilayah rentan terhadap kerawanan pangan. UU 18 tahun 2012, Pasal 114 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi.
2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**KAB KUKAR**	**Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan**	**5 Desa/Kelurahan**	**400.000.000,00**	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB KUKAR	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan pangan Yang Tertangani	**21 Desa/Kelurahan**	**2.500.000.000,00**	
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Enggalam kec. Muara Wis Desa Semayang Kec. Kenohan Desa Muai Kecamatan kembang Janggut Desa Sedulang Kecamatan Muara kaman.	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	300.000.000,00	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Sepatin Kecamatan Anggana, Desa Kupang baru Kec. Muara Kaman, Desa Muara Siran Kec. Muara Kaman, Desa Tuboq Kec. Tabang dan Desa Muara Belinau Kec. Tabang	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	21 Dokumen	1.800.000.000,00	Pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 1, 8 M. Pada tahun 2025 diajukan dengan anggaran yang sama untuk dapat melakukan intervensi pada daerah yang rentan rawan pangan sebanyak 21 Desa. Selain itu agar Program Penanganan Kerawanan Pangan berjalan sesuai target dan sasaran untuk mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.04.2.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	KAB KUKAR	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	100.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	KAB KUKAR	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan gizi Kabupaten/Kota	2 Laporan	200.000.000,00	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi kabupaten/kota yang melibatkan OPD terkait dan stakeholder lainnya. Difokuskan Untuk Penanganan Daerah yang terindikasi Rawan Pangan (Koor- dinasi Penanganan rawan pangan di 21 Desa Rawan pangan Prioritas 2 dan 3)
2.09.04.2.02.04	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	KAB KUKAR	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi			Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	KAB KUKAR	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	4 Dokumen	500.000.000,00	Kegiatan Untuk mendukung Aksi Penurunan Stunting dan Masuk dalam aksi Bangda Dalam Percepatan Penurunan Stunting, Pemberian Makanan Bergizi kepada anak sekolah usia emas (SMP), dan orang tua dalam rangka pemberian Komunikasi, Informasi, Edukasi tentang kewaspadaan pangan dan Gizi.
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**KAB KUKAR**	**Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi**	**90,77**	**300.000.000,00**	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	KAB KUKAR	Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi	**95,35**	**1.150.000.000,00**	
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**KAB KUKAR**	**Terciptanya Keamanan Pangan Segar**	**89**	**300.000.000,00**	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KAB KUKAR	Terciptanya Keamanan Pangan Segar	**95,35**	**1.150.000.000,00**	
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Loa Kulu, Kota Bangun, Tenggarong Seberang, Muara Jawa,Sebulu,Marang Kayu. Samboja , Kota Bangun, Tenggarong, Loa Janan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokuemn	50.000.000,00	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20 Kecamatan (20 Pasar / gapoktan)	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	200.000.000,00	Rekomendasi Keamanan Pangan di Fokuskan Pada daerah Penghasil Pangan Segar : Pengawasan Keamanan PSAT (Pangan Segaran Asal Tanaman) Pre Market merupakan pengawasan pendahuluan yang dilakukan sebelum suatu produk beredar di masyarakat, antara lain pengawasan produk hasil pertanian (segar dan olahan primer) Pengawasan keamann PSAT pre market dilakukan dalam bentuk inspeksi pemenuhan persyaratan keamanan pangan dalam rangka pemberian: a. Sertifikasi (Prima, GAP, GHP, GMP, dll); Masuk dalam aksi Bangda Dalam Percepatan Penurunan Stunting
2.09.05.2.01.06	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Loa Kulu, Kota Bangun, Tenggarong Seberang, Muara Jawa,Sebulu,Marang Kayu. Samboja , Kota Bangun, Tenggarong, Loa Janan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	2 Dokumen	75.000.000,00	Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	20 Kecamatan (20 Pasar / gapoktan)	Jumlah Rekomendasi Perizinan Kemanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	20 Dokumen	300.000.000,00	Pembinaan Pengusaha Pangan Segar Asal Tumbuhan untuk Mendapatkan Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar dengan cara melakukan fasilitasi : Pengawasan Keamanan PSAT Post-Market merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan setelah suatu produk beredar di masyarakat.. Kegiatan ini Masuk dalam Aksi Bangda dalam Rangka Aksi Penurunan Stunting
2.09.05.2.01.07	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Loa Kulu, Kota Bangun, Tenggarong Seberang, Muara Jawa,Sebulu,Marang Kayu. Samboja , Kota Bangun, Tenggarong, Loa Janan	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	4 Dokumen	75.000.000,00	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20 Kecamatan	Jumlah Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	Usulan Tambahan Anggaran digunakan untuk Penyediaan sarana Pengujian Keamanan Pangan (rapit Test) . Kegiatan ini Masuk dalam Aksi Bangda dalam Rangka Aksi Penurunan Stunting
2.09.05.2.01.08	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Loa Kulu, Kota Bangun, Tenggarong Seberang, Muara Jawa,Sebulu,Marang Kayu. Samboja , Kota Bangun, Tenggarong, Loa Janan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal Tumbuhan	4 Laporan	50.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	20 Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi keamanan dan Mutu Pangan segar Asal Tumbuhan	20 Laporan	150.000.000,00	Tambahan Anggaran digunakan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan di 20 Kecamatan yang bertujuan mengiden- tifikasi serta memverifikasi data base petani hortikultura/produsen/retail/ warung/umkm dan Koordinasi Instansi Pembina di Provinsi Kaltim
2.09.05.2.01.09	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Marang kayu, Kota Bangun, sebulu, Muara Jawa , Muara Badak	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4 Dokumen	50.000.000,00	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Marang kayu, Kota Bangun, sebulu, Muara Jawa , Muara Badak	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	8 Dokumen	400.000.000,00	Tambahan Anggaran diajukan dalam Penguatan Kelembagaan pangan Segar dengan Menyusun SOP tentang kebijakan di Bidang Keamanan Pangan serta pembentukan OKKPD Penguatan Kelembagaan pangan, Aksi Bangda dalam Rangka Aksi Penurunan Stunting
			TOTAL		**10.837.786.621,00**		TOTAL			**76.120.164.434,00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat baik yang disampaikan langsung melalui SIPD RI, yang merupakan bagian dari kegiatan menjaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan Tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan. Untuk Tahun 2025 terdapat beberapa usulan masyarakat di kecamatan yang masuk dalam program dan kegiatan prioritas Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Kutai Kartanegara.

Tidak semua usulan masyarakat bisa diakomodir dalam Renja Perangkat daerah, usulan yang bisa diterima sebatas yang sesuai dengan program dan kegiatan prioritras perangkat daerah, serta mendukung program prioritas kepala Daerah, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sehingga program dan kegiatan usulan masyarakat yang sesuai prioritas Perangkat Daerah akan dibuat skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Usulan aspirasi masyarakat yang masuk ke Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 7 (T-C 32).

Tabel 7

TABEL : TC-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
I	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				
A	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota				
	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan pemerintah				
1.	Pembangunan/Rehabilitasi Lumbung Pangan	Kelompok Tani Bhinnika Jaya, Dusun Sidomakmur, RT 19 Desa Bhuana Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara.	Tersedianya Bangunan Lumbung Pangan Masyarakat	1 Unit	Dinas Ketahanan Pangan akan Memfasilitasi Pembangunan Lumbung Pangan dengan Catatan Proporsal agar disesuaikan dengan permintaan, (Permintaan Lumbung Proporsal Mesin Pengering) Serta Melampirkan Surat Hibah Lahan dan Rekomendasi dari PPL Setempat), serta disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah
2.	Pembangunan/Rehabilitasi Lumbung Pangan	Jln. Reformasi III RT.002 Desa Benua Puhun Kecamatan Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara	Tersedianya Bangunan Lumbung Pangan Masyarakat	1 Unit	Dinas Ketahanan Pangan akan Memfasilitasi Pembangunan Lumbung Pangan dengan Catatan apabila sudah ada Proposal , Surat Keterangan dari Kepala Desa,Surat Keterangan Dari PPL Setempat, Surat Hibah Lahan, dan Foto Lokasi), serta disesuaikan dengan kemampuan Keuangan yang ada.
3	Pembangunan/Rehabilitasi Lumbung Pangan	Jl. Gerbang Dayaku, Kel. Rapal Lambur Kecamatan Tenggarongb Kab. Kutai Kartanegara	Tersedianya Bangunan Lumbung Pangan Masyarakat	1 Unit	Dinas Ketahanan Pangan akan Memfasilitasi Pembangunan Lumbung Pangan dengan Catatan apabila sudah ada Proposal , Surat Keterangan dari Kepala Desa,Surat Keterangan Dari PPL Setempat, Surat Hibah Lahan, dan Foto Lokasi), serta disesuaikan dengan kemampuan Keuangan yang ada.
	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				
1.	Pembangunan/Rehabilitasi Lantai Jemur	RT.03 Dusun Tulak Tepen Desa Embalut Kecamatan tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara	Tersedianya Bangunan Lantai Jemur	1 Unit	Permohonan sudah sesuai, perlu adanya Surat Hibah Lahan serta Rekomendasi dari PPL Setempat
2.	Pembangunan/Rehabilitasi Lantai Jemur	Poktan Surya bakti Rt 06 Kel.Wonotirto Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara	Tersedianya Bangunan Lantai Jemur	1 Unit	Diharap untuk Upload Proporsal, serta melampirkan Rekomendasi dari Desa, PPL Setempat serta Surat Hibah Lahan
3.	Pembangunan/Rehabilitasi Lantai Jemur	jln. Ulin RT.010 Desa Segihan Kecamatan Sebulu Kab. Kutai Kartanegara	Tersedianya Bangunan Lantai Jemur	1 Unit	Pada Permohonan perlu menambahkan Surat Hibah Lahan serta Rekomendasi dari PPL Setempat
4.	Pembangunan/Rehabilitasi Lantai Jemur	Jl. Bina Tani RT. 003 Desa Semangko, Kab. Kutai Marang KayuKartanegara	Tersedianya Bangunan Lantai Jemur	1 Unit	Perlunya menambahkan Rekomendasi dari pihak PPL Setempat serta Surat Hibah atas lahan yang nantinya akan di bangun Lantai Jemur
5.	Pembangunan/Rehabilitasi Lantai Jemur	desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara Kecamatan anggana	Tersedianya Bangunan Lantai Jemur	1 Unit	Perlu menambahkan Proporsal serta Rekom dari Kepala Desa, Rekom PPL Setempat serta foto lokasi dan Surat Hibah Atas Lahan Yang nantinya akan dibangun Lantai Jemur
6	Pembangunan/Rehabilitasi Lantai Jemur	Jl. Dr. Nazir RT.03, Kab. Kutai Kartanegara Desa Kayu batu Kecamatan sebulu	Tersedianya Bangunan Lantai Jemur	1 Unit	Untuk Perihal serta Isi Proporsal harap di perjelas sesuai dengan kebutuhan (Lantai Jemur) dan melampirkan Rekom dari PPL Setempat Serta Surat Hibah atas lahan yang nantinya akan dibangun Lantai Jemur

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengamanatkan agar upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan diutamakan dari produksi dalam negeri. Upaya ini mengisyaratkan agar dalammemantapkan ketahanan pangan harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan secara terintegrasi. Yang telah dijabarkan dalam PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Kedaulatan pangan memberikan dukungan kekuatan dalam menentukan kebijakan pangan secara mandiri yang diarahkan untuk menyediakan beraneka ragam pangan dari produksi dalam negeri sesuai potensi sumber daya yang kita miliki. Ketersediaan pangan yang beraneka ragam akan mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana yang diamanatkan dalam PP 22/2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dan Permentan 43/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Serta Visi Misi Gubernur Kalimantan Timur "Berani untuk Kaltim Berdaulat, pada Misi Kedua Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan Dengan demikian, dapat segera terwujud manusia Indonesia yang sehat, aktif dan produktif.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan pembangunan ketahanan pangan pada hakekatnya adalah untuk memperkuat ketahanan pangan ditingkat wilayah, rumah tangga sampai dengan perseorangan/individu.

Sesuai dengan Visi Misi Bupati Terpilih, Tema Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah Pemantapan pemberdayaan Masyarakat Untuk Akselerasi dan transformasi Pembangunan. Dalam misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.

Sesuai dengan Fokus dan sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2025, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
2. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

Kedua tujuan Renja tersebut diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengatasi ancaman ketahanan pangan. Tujuan tersebut akan dijabarkan melalui sasaran Dinas Ketahanan Pangan

Adapun Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan target nilai Tahun 2025 sebesar 80.
2. Ketersediaan pangan utama (Beras/Jagung sesuai kebutuhan) pada Tahun 2025 sebesar 118%.
3. Meningkatnya Pencapaian Score PPH ketersediaan dengan target score Tahun 2025 sebesar 91.
4. Meningkatnya ketersediaan pangan daerah, yang ditunjukkan dengan Tercapainya ketersediaan energi sesuai standar sebesar 2456 kkal/kapita/hari, serta ketersediaan protein sebesar 115 gram/perkapita/hari pada Tahun 2025.
5. Menurunnya jumlah desa/kelurahan yang terindikasi rawan bangan sebanyak 20 desa Untuk Tahun 2025.
6. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan dengan skore PPh pada Tahun 2025 sebesar 88
7. Tercapainya tingkat keamanan pangan segar sebesar 93,45% pada Tahun 2095.

Berikut penjabaran atas keselarasan misi yang diemban, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel 8 berikut :

TABEL T-C. 28.

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada akhir tahun
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (Nilai SAKIP)	76,01	77	78	79	80	81	81
2	Persentase Ketersediaan pangan utama (Beras/Jagung sesuai kebutuhan)	128,72	129,00	130,00	134,00	137,00	140,00	140,00
3	Skore Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skore	96,48	97,89	98,59	99,30	100,00	100,00
4	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita							
	- Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	2365	2372	2379	2386	2393	2400	2400
	- Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)	79,04	79,42	79,84	80,21	80,59	80,97	80,97
5	Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skor PPH Konsumsi)	81,30	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	90,00
6	Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	6,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	49,00
7	Kecukupan Konsumsi Energi dan Kecukupan konsumsi Protein							
	- Kecukupan Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari)	1971,00	2.050,00	2.150,00	2.175,00	2.200,00	2.225,00	2.225,00
	- Kecukupan Konsumsi Protein (gram/perkapita/hari	54,70	55,50	57,00	57,10	57,20	57,25	57,25
8	Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan Prioritas I	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00
9	Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi (Persen)	90,77	90,77	91,00	91,50	92.00	93,00	93,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana program prioritas beserta kegiatannya disajikan berdasarkan identifikasi dan telaahan terhadap sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang menjadi urusan Dinas Ketahanan Pangan. Identifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh program yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten KutaiKartanegara dalam mendukung visi misi Bupati menjadi prioritas utama dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024, sehingga sinergitas antara sasaran pembangunan yang tertuang dalam Sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah dengan Renja Dinas Ketahanan Pangan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No 050 Tahun 2021 dapat diwujudkan.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Meliputi :
   - Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terutama misi kedua misi 2 :“Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia YangBerakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.
   - Pengentasan Kemiskinan pada daerah rawan dan rentan rawan pangan
   - Peningkatan Kualitas konsumsi pangan Daerah dengan pemberdayaan Masyarakat.
   - Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Cadangan Pangan Daerah
   - Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
   - Pencapaian Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Sesuai hasil analisis terhadap program dan kegiatan, serta memperhatikan usulan masyarakat, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 sebanyak 5 (Lima) program dan 15 (Lima Belas) kegiatan dan 54 (Lima Puluh Empat) sub kegiatan, dengan Rencana Anggaran yang telah disusun sebesar Rp. 76.120.164.434,00 secara garis besar dapat diuraikan sebagai mana tabel 9 berikut :

Tabel 9

RINGKASAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025

Kode	Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
2.09.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**14.077.104.434,00**
000.01.2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.000.000.000,00**
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	450.000.000,00
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000,00
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000,00
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral daerah	250.000.000,00
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	50.000.000,00
2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.626.795.674,00**
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.466.795.674,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000,00
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD	110.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	25.000.000,00
2.09.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**105.000.000,00**
2.09.01.2.03.05	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000,00
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000,00

Kode	Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
2.09.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**416.260.000,00**
2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	166.260.000,00
2.09.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	50.000.000,00
2.09.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00
2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**450.000.000,00**
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.000.000,00
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00
2.09.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75.000.000,00
2.09.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000,00
2.09.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.845.000.000,00**
2.09.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	945.000.000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.000.000,00
2.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	700.000.000,00
2.09.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	800.000.000,00
2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah**	**559.048.760,00**
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	499.048.760,00
2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**75.000.000,00**
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00

Kode	Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00
2,9	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	
2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**46.100.000.000,00**
2.09.02.2.01	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**	**46.100.000.000,00**
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	40.700.000.000,00
2.09.02.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisai Penyediaan Infrastruktur Logistik	400.000.000,00
2.09.02.2.01.06	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabup	5.000.000.000,00
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**12.043.060.000,00**
2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**7.130.460.000,00**
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	300.000.000,00
2.09.03.2.01.07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	150.000.000,00
2.09.03.2.01.08	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	6.030.460.000,00
2.09.03.2.01.09	Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	300.000.000,00
2.09.03.2.01.10	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00
2.09.03.2.01.12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	150.000.000,00
2.09.03.2.01.16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	100.000.000,00
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**2.000.000.000,00**
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2.000.000.000,00
2.09.03.2.04	*Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi*	**2.912.600.000,00**

Kode	Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	100.000.000,00
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.687.600.000,00
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	125.000.000,00
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**2.750.000.000,00**
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	**250.000.000,00**
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	250.000.000,00
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**2.500.000.000,00**
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.800.000.000,00
2.09.04.2.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	200.000.000,00
2.09.04.2.02.04	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	500.000.000,00
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**1.150.000.000,00**
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**1.150.000.000,00**
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00
2.09.05.2.01.06	Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	300.000.000,00
2.09.05.2.01.07	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00
2.09.05.2.01.08	Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	150.000.000,00
2.09.05.2.01.09	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	400.000.000,00
		76.120.164.434,00

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan akhir RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Semua Program dan kegiatan dalam Rancangan Renja ini telah disesuaikan dengan program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, demikian juga untuk pagu anggarannya. Namun

demikian akan dilaksanakan sinkronisasi dan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan, disusun sekala prioritas sehingga rancangan renja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini.

Rencana Anggaran pada Rancangan Renja Sebesar Rp. 76.120.164.434,00 (Tujuh Puluh Enam Milyar Seratus Dua Puluh Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) dengan prioritas :

- Pembayaran gaji ASN.
- Kegiatan Generik (operasional kantor)
- Pengentasan Kemiskinan
- Penanggulangan Inflasi
- Rencana Aksi Penurunan stunting
- Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah
- Mendukung Program Bupati dalam penanggulangan kemiskinan

Rencana Program dan Kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 10 (TC 33) sebagaimana berikut.

TABEL : 10

Tabel TC 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025(N)					Rencana Tahun 2026(N+1)	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**KAB KUKAR**	**79**	**14.077.104.434,00**	APBD KAB		**79**	**7.677.786.621,00**
000.01.2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**KAB KUKAR**	**13 Dokumen**	**1.000.000.000,00**	APBD KAB		**13 Dokumen**	**350.000.000,00**
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB KUKAR	3 Dokumen	450.000.000,00	APBD KAB	Pengalokasian termasuk mengikuti Musrenbang Kecamatan dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, serta Mengikuti Rapat Koordinasi dengan Provinsi dan Pusat (APBN dan DAK, APBD Prov dan Bantuan Keuangan) Pagu Awal 80.000.000 menjadi 150.000.000, Fasilitasi untuk Rapat koordinasi internal dan eksternal dalam Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 Pagu Awal 20.000.000 menjadi 50.000.000, penyusunan Renstra 2025-2030 dengan subtansi isi mengkaji permasalahan, isu strategis daerah dan kebijakan dari provinsi dan nasional. Pagu Awal 100.000.000 menjadi 250.000.000	6 Dokumen	200.000.000,00
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB KUKAR	5 Laporan	50.000.000,00	APBD KAB		5 Laporan	50.000.000,00
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB KUKAR	5 Laporan	150.000.000,00	APBD KAB	Kegiatan Untuk Melaksankan Analisis permasalahan capaian kinerja melalui hasil E Pantau Tri Wulan 1,2,3 ,4 dan Laporan Akhir P{agu Awal 100.000.000 menjadi 150.000.000	5 Laporan	100.000.000,00
2.09.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	KAB KUKAR	1 Dokumen	50.000.000,00	APBD KAB	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Sub Kegiatan Baru) Untuk Pemenuhan Satu Data Indonesia Kutai Kartanegara		
2.09.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	KAB KUKAR	1 Data	250.000.000,00	APBD KAB	Untuk Pemenuhan Dokumen Pada Satu Data Indonesia Kukar. atau Data (BECIK) - Kecamatan sebagai pusat data (operasional, Honorarium, Peralatan, pendampingan teknis) (Sub Kegiatan baru)		
2.09.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB KUKAR	1 Berita Acara	50.000.000,00	APBD KAB	Untuk Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renja Tahun 2026, dan Penyusunan Renstra Tahun 2025 - 2029		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025(N)					Rencana Tahun 2026(N+1)	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**KAB KUKAR**	**12 Laporan**	**8.626.795.674,00**	APBD KAB		**12 Laporan**	**6.303.737.861,00**
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KAB KUKAR	56 Orang/bulan	8.466.795.674,00	APBD KAB	Mengikuti hasil perhitungan tahun 2024 untuk mengantisipasi kenaikan Gaji dan Perpindahan Pegawai sebagaimana yang terjadi tahun 2024	56 Orang/bulan	6.223.737.861,00
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KAB KUKAR	1 Laporan	25.000.000,00	APBD KAB	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (sub kegiatan baru)		
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	KAB KUKAR	12 Laporan	110.000.000,00	APBD KAB	Diusulkan sama dengan anggaran tahun 2024, karena anggaran 80 Juta sesuai Ranwal tidak mencukupi untuk membayar Honor PA dan lainnya. Penambahan Untuk Mengcover Honor PA, dan PPTK Kegitan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang belum sesuai standar	12 Laporan	80.000.000,00
2.09.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KAB KUKAR	1 Dokumen	25.000.000,00	APBD KAB	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Sub Kegiatan Baru)		
2.09.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**KAB KUKAR**	**12 Dokumen**	**105.000.000,00**	APBD KAB		**12 Dokumen**	**40.000.000,00**
2.09.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	KAB KUKAR	1 laporan	25.000.000,00	APBD KAB	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan baru)		
2.09.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	KAB KUKAR	1 laporan	50.000.000,00	APBD KAB	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan baru)	12 Laporan	40.000.000,00
2.09.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	KAB KUKAR	12 Laporan	30.000.000,00	APBD KAB	Untuk Penyusunan Laporan Rekonsiliasi BMD pada Perangkat Daerah		
2.09.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**		**6 Dokumen**	**416.260.000,00**	APBD KAB		**6 Dokumen**	**-**
2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	KAB KUKAR	170 Paket	166.260.000,00	APBD KAB	Usul Penambahan Anggaran untuk Pengadaan Baju Dinas (Batik/Korpri, Baju Miskat). Anggaran ini diajukan karena Pada Dinas Ketahanan Pangan masih belum pernah pengadaan Pakaian Dinas dimaksud, sehingga terkesan tidak ada disiplin karena baju yang dipakai beraneka ragam.		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025(N)					Rencana Tahun 2026(N+1)	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	KAB KUKAR	1 Dokumen	50.000.000,00	APBD KAB	Anggaran diusulkan sama dengan Tahun 2024, karena banyaknya Informasi Kepegawaian yang harus dilaksanakan oleh Perangkat daerah melalui Sistem Informasi Kepegawaian		
2.09.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	KAB KUKAR	25	200.000.000,00	APBD KAB	Anggaran diusulkan dalam rangka peningkatan Kapasitas SDM, dalam rangka memenuhi kewajiban 20 Jam Pelatihan untuk setiap ASN. Serta Untuk Peningkatan Kapasitas Petugas Keamanan Pangan di Tiga Wilayah (Hulu, Tengah, dan Pantai)		
2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**KAB KUKAR**		**450.000.000,00**	APBD KAB			**350.000.000,00**
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KAB KUKAR	2 Paket	55.000.000,00	APBD KAB	Untuk Pengadaan Kertas dan Alat Tulis Kantor lainnya dalam menunjang administrasi perkantoran	1 Paket	55.000.000,00
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KAB KUKAR	1 Paket	50.000.000,00	APBD KAB	Pembelian Makan Minum Rapat dan bahan Logistik lainnya	4 Paket	50.000.000,00
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	KAB KUKAR	1 Paket	20.000.000,00	APBD KAB	Perubahan target dari 3 Paket (Kertas Kop, Map dan Penggandaan menjadi 1 Paket (Cetak Map dan Penggandaan)	1 Paket	20.000.000,00
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB KUKAR	120 Laporan	150.000.000,00	APBD KAB	Untuk Membiayai Pelaksanaan Perjalanan Dinas di dalam dan Luar Daerah	200 Laporan	150.000.000,00
2.09.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	KAB KUKAR	2000 Dokumen	75.000.000,00	APBD KAB		2000 Dokumen	75.000.000,00
2.09.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		KAB KUKAR	1 Dokumen	100.000.000,00	APBD KAB	Semua urusan menggunakan aplikasi, diperlukan tambahan anggaran dalam rangka pengembangan website Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	
2.09.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan**	**KAB KUKAR**	**104 Unit**	**2.845.000.000,00**	APBD KAB		**3 Unit**	**-**
2.09.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	KAB KUKAR	3 Unit	945.000.000,00	APBD KAB	Diusulkan Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Untuk Kepala Bidang (3 Bidang), mengingat kendaraan yang ada sudah tidak layak pakai.		
2.09.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	KAB KUKAR	1 Unit	400.000.000,00	APBD KAB	Mobil Caroseri pendukung distribusi bahan makanan pokok di kecamatan dalam Rangka Pengendalian inflasi		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025(N)					Rencana Tahun 2026(N+1)	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	KAB KUKAR	100 Unit	700.000.000,00	APBD KAB	Anggaran ini diusulkan mengingat kondisi mebeler pada Dinas Ketahanan Pangan sudah tidak representatif, Mebel untuk Ruang rapat, Kursi Kerja serta lemari untuk pendukung dalam penataan arsip yang sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan.		
2.09.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		KAB KUKAR	1 Paket (Ruangan)	800.000.000,00	APBD KAB	Penataan Ruangan Kantor agar lebih representatif dalam Melaksanakan Tugas Fungsi Organisasi (Rehab Ruang kantor) 'Ruang Kerja Bidang Distribusi, Ruang Kerja Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Ruang Kerja Bidang Konsumsi Pangan, Ruang Kerja Biang Keamanan Pangan, Ruang Kerja Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, Ruang Kerja Sekretariat (Sub Bagian Umum, Kepegawaian) Ruang Rapat, Ruamg Untuk Penyusunan Arsip, Ruangan Tunggu Tamu, Ruang Untuk Penyimpanan Barang (ATK dll),		
2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**	**KAB KUKAR**	**12 Bulan**	**559.048.760,00**	APBD KAB		**12 Bulan**	**559.048.760,00**
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KAB KUKAR	12 Laporan	30.000.000,00	APBD KAB	Pembayaran Rekening Internet Tahun 2025	12 Laporan	30.000.000,00
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KAB KUKAR	4 Laporan	30.000.000,00	APBD KAB		4 Laporan	15.000.000,00
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KAB KUKAR	12 Laporan	499.048.760,00	APBD KAB	Pembayaran Tenaga Honor sebanyak 25 Orang	12 Laporan	514.048.760,00
2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara***	**KAB KUKAR**	**28 Unit**	**75.000.000,00**	APBD KAB		**28 Unit**	**75.000.000,00**
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	KAB KUKAR	2 Unit	25.000.000,00	APBD KAB	Pemeliharaan Mobil Jabatan sebanyak 2 Unit (Bahan Bakar dll)	2 Unit Roda 4	25.000.000,00
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	KAB KUKAR	28 Unit	50.000.000,00	APBD KAB	Pemelihraan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Pembayaran Pajak (STNK)	24 Unit Roda 2 dan 4 Unit Roda 4	50.000.000,00
2,9	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025(N)					Rencana Tahun 2026(N+1)	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**	**Kab. Kukar**	**20 Unit**	**46.100.000.000,00**	APBD KAB		**20 Unit**	**750.000.000,00**
2.09.02.2.01	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**	**Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**KAB KUKAR**	**20 Unit**	**46.100.000.000,00**	APBD KAB		**20 Unit**	**750.000.000,00**
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	Jumlah Lantai Jemur Lumbung Pangan masyarakat	LANTAI JEMUR BIASA : Kec. Tenggarong (Kel Mangkurawang dan Bukit Biru), Kec. Loa Kulu (Desa Sungai Payang), Kec. Marang Kayu (Desa Sebuntal), Kec. Muara Kaman (Desa Bunga Jadi); LANTAI JEMUR UV : Kec. Sebulu (Desa Manunggal Daya), Kec. Tenggarong Seberang (Desa Karang Tunggal), Kec. Tenggarong (KeluraHAN Loa Ipuh, Maluhu dan Bukit Biru); RICE MILLING UNIT : Kec. Tenggarong (Kel Mangkurawang, Bukit Biru), Kec. Loa Kulu (Desa Sungai Payang, Loh Sumber), Kec. Marang Kayu (Desa Sebuntal), Kec. Muara Kaman (Desa Cipari Makmur, Benua Puhun, Bunga Jadi), Kec. Loa Janan (Desa Loa Duri Ulu); LANTAI JEMUR PORTABEL :	5 Unit lantai Jemur Biasa, 5 Unit Lantai Jemur UV, 10 unit Rmu dan 50 Unit Lantai Jemur Portabel, dan 1 Paket	40.700.000.000,00	APBD KAB	Usulan tambahan anggaran untuk Pembangunan Lantai jemur UV, lantai Jemur Biasa, Lantai Jemur Portabel dan Rice Milling Unit (RMU) dimaksudkan untuk meningkatkan mutu hasil produksi pertanian (terutama untuk pengeringan) hasil pertanian, dalam rangka menunjang pembangunan pertanian Berbasis kawasan, serta untuk	2	200.000.000,00
2.09.02.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisai Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	KAB KUKAR	2 Dokumen	400.000.000,00	APBD KAB	Kegiatan Ini diperlukan dalam Koordinasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan (Penyusunan Peta Kebutuhan Infrastruktur Kemandirian Pangan) dan Prognosa Neraca Pangan	1 Dokumen	50.000.000,00
2.09.02.2.01.06	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Kecamatan Tenggarong (Kel Mangkurawang dan Bukit Biru), Kecamatan Loa Kulu (Desa Sungai Payang), Kecamatan Marang Kayu (Desa Sebuntal), Kecamatan Muara Kaman (Desa Bunga Jadi.	5 Unit	5.000.000.000,00	APBD KAB	Untuk Mendukung Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan Paket Pembangunan Bangunan Lumbung Pangan masyarakat sebanyak 5 Unit Unit	1	500.000.000,00
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Kecukupan Konsumsi Energi**	**Tersebar 18 Kecamatan**	**2.175,00**	**12.043.060.000,00**	APBD KAB		**2.175,00**	**1.650.000.000,00**
		Kecukupan Konsumsi Protein		**57,100**		APBD KAB		**57,100**	
2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Stabilitas Harga Pangan (Koefisien Variasi Harga Pangan / Beras)**	**Tersebar 18 Kecamatan**	**5**	**7.130.460.000,00**	APBD KAB		**5**	**225.000.000,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025(N)					Rencana Tahun 2026(N+1)	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Desa Cipari makmur kec Muara Kaman dan Desa Manunggal Jaya Kecamatan tengarong Seberang	2 Unit	300.000.000,00	APBD KAB	Kegiatan Diperlukan dalam Rangka menjaga Stabilitas Harga Pangan dan Pasokan Stoc Pangan. Penguatan Bantuan berupa bahan pangan Pokok dalam Rangka Mencegah terjadinya kelangkaan Pangan dan Menjamin Kelancaran Distribusi Pangan melalui Toko Tani Indonesia.		
2.09.03.2.01.07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	KAB KUKAR	100 Keluarga	150.000.000,00	APBD KAB	Kegiatan Untuk mendukung Aksi Penurunan Stunting dan Masuk dalam aksi Bangda Dalam Percepatan Penurunan Stunting melalui Pembinaan Keluarga dalam Peningkatan Ketahanan Pangan		
2.09.03.2.01.08	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	TENGGARONG SEBERANG	7 Laporan	6.030.460.000,00	APBD KAB	Usulan Tambahan anggaran untuk Sub Kegiatan baru, Untuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Pangan Murah dan Peringatan Hari Pangan Seluruh Dunia, Serta Untuk Gerakan menanam Cabe dalam rangka pengendalian Inflasi di Kabupaten Kutai Kartanegara		
2.09.03.2.01.09	Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Laporan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	KAB KUKAR	4 Laporan	300.000.000,00	APBD KAB	Kegiatan Untuk mendukung Aksi Penurunan Stunting dan Masuk dalam aksi Bangda Dalam Percepatan Penurunan Stunting, melalui Pembinaan UMKM Pangan Lokal dalam Pengembangan Usaha = Berupa Pelatihan Pengembangan Olahan Pangan Lokal B2SA) Bagi UMKM dan bantuan Alat		
2.09.03.2.01.10	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman	1 Unit	100.000.000,00	APBD KAB	Pembinaan Gapoktan/Poktan sebagai Lembaga Distribusi Pangan (Bantuan Modal Untuk Gapoktan Berupa gabah Kering Giling	1 Unit	100.000.000,00
2.09.03.2.01.12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Kembang Janggut, Kota Bangun, Sebulu, Tenggarong, Loa Janan, Muara Badak, Samboja	1 Laporan	150.000.000,00	APBD KAB	Laporan Harga pangan sebagai bahan untuk mengetahui potensi terjadinya Inflasi, melalui Pemantauan harga dilakukan secara Mingguan (setiap hari Rabu pagi) selama 12 bln (Jan-Des). Honor enumerator thn ini hanya tersedia 6 bln untuk 1 orang saja. Penambahan anggaran untuk: tambahan honor enumerator, SPPD panggil rapat koordinasi dari Petugas Kecamatan, bantuan paket data internet, perjalanan dinas, dll. (Sama dengan Anggaran tahun 2024)	2 Laporan	50.000.000,00
2.09.03.2.01.16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	KAB KUKAR	1 Dokumen	100.000.000,00	APBD KAB	Usulan Tambahan Anggaran untuk meningkatkan kualitas Laporan dengan menyediakan data yang lebih lengkap dan akurat, meliputi Dokumen Ketersediaan Pangan, Ketersediaan Energi, Protein dll	2 Dokumen	75.000.000,00
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Penguatan Cadangan pangan Pemerintah**	Tersebar 18 Kecamatan	**150 Ton**	**2.000.000.000,00**	APBD KAB		**150 Ton**	**600.000.000,00**
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersebar 18 Kecamatan	150 Ton	2.000.000.000,00	APBD KAB	Sesuai dengan Rekomendasi BPKP dalam evaluasi Cadangan Pangan, maka harus menyediakan Cadangan Pangan sesuai dengan rumus hitungan yang ada di Permentan No 11 Tahu 2018 Disamping itu juga dalam sebagai kegiatan Pengendalian inflasi. Pengadaan Beras Untuk Cadangan Pangan dan Penyaluran sesuai kebutuhan (Pengadaan Beras Cadangan Pangan 150 Ton = Rp.1.800.000.000,-., Biaya Distribusi Rp. 200.000.000,00	60	600.000.000,00
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Peningkatan Pembinaan Penganekaragaman Konsumsi pangan**	Tersebar 18 Kecamatan	**30 Kelompok**	**2.912.600.000,00**			**30 Kelompok**	**825.000.000,00**
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	KAB KUKAR	1 Dokumen	100.000.000,00	APBD KAB	Penyusunan Dokumen Direktori Konsumsi Pangan dalam Rangka Peningkatan Skore Pola Pangan Harapan	2 Dokumen	150.000.000,00
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	20 Kecamatan	32 Laporan	2.687.600.000,00	APBD KAB	Bantuan Saprodi untuk 9 Kelompok Wanita (PKK dan dasawisma), Gerakan Makan Telor dan Minum Susu Untuk Anak Sekolah SD dalam Rangka Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan, Pelatihan Pengolahan Pemanfaatan Pangan Lokal berupa Pelatihan pembuatan madu Analog, Sosialisasi dan Pemberian Menu B2SA Kepada Balita Usia Dua Tahun (BADUTA) Kader Posyandu untuk Pencegahan Stunting, Pondok Pangan Etam Untuk penanggu-langan Kemiskinan serta Pembinaan Peserta Festival pangan Lokal	15 Laporan	600.000.000,00
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Samboja, Muara Jawa, Marang Kayu, Muara Badak	4 Laporan	125.000.000,00	APBD KAB	Pembinaan dan Evaluasi Konsumsi Pangan	4 Laporan	75.000.000,00
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan**	**Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan**	**19 Desa**	**2.750.000.000,00**	APBD KAB		**5 Desa**	**500.000.000,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025(N)					Rencana Tahun 2026(N+1)	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	KAB KUKAR	**1 Dokumen**	**250.000.000,00**	APBD KAB		**1 Dokumen**	**100.000.000,00**
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	KAB KUKAR	1 Dokumen	250.000.000,00	APBD KAB	Peta Rawan Pangan Sebagai Dasar Untuk Intervensi Penanganan Rawan Pangan (penanggulangan Kemiskinan). Penyusunan Peta Rawan pangan (Peta FSVA) Kab Kutai Kartanegara untuk Mengetahui Daerah yang terindikasi Rentan Rawan pangan. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis wilayah rentan terhadap kerawanan pangan. UU 18 tahun 2012, Pasal 114 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi.	2 Dokumen	100.000.000,00
2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan**	KAB KUKAR	**21 Desa/Kelurahan**	**2.500.000.000,00**	APBD KAB		**19 Desa/Kelurahan**	**400.000.000,00**
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Sepatin Kecamatan Anggana, Desa Kupang baru Kec. Muara Kaman, Desa Muara Siran Kec. Muara Kaman, Desa Tuboq Kec. Tabang dan Desa Muara Belinau Kec. Tabang	21 Dokumen	1.800.000.000,00	APBD KAB	Pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 1, 8 M. Pada tahun 2025 diajukan dengan anggaran yang sama untuk dapat melakukan intervensi pada daerah yang rentan rawan pangan sebanyak 21 Desa. Selain itu agar Program Penanganan Kerawanan Pangan berjalan sesuai target dan sasaran untuk mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara	5 Dokumen	300.000.000,00
2.09.04.2.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	KAB KUKAR	2 Laporan	200.000.000,00	APBD KAB	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi kabupaten/kota yang melibatkan OPD terkait dan stakeholder lainnya. Difokuskan Untuk Penanganan Daerah yang terindikasi Rawan Pangan (Koor- dinasi Penanganan rawan pangan di 21 Desa Rawan pangan Prioritas 2 dan 3)	4 Laporan	100.000.000,00
2.09.04.2.02.04	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	KAB KUKAR	4 Dokumen	500.000.000,00	APBD KAB	Kegiatan Untuk mendukung Aksi Penurunan Stunting dan Masuk dalam aksi Bangda Dalam Percepatan Penurunan Stunting, Pemberian Makanan Bergizi kepada anak sekolah usia emas (SMP), dan orang tua dalam rangka pemberian Komunikasi, Informasi, Edukasi tentang kewaspadaan pangan dan Gizi.		
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi**	KAB KUKAR	**95,35**	**1.150.000.000,00**	APBD KAB		**95,35**	**300.000.000,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025(N)					Rencana Tahun 2026(N+1)	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Terciptanya Keamanan Pangan Segar**	KAB KUKAR	**95,35**	**1.150.000.000,00**	APBD KAB		**95,35**	**300.000.000,00**
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20 Kecamatan (20 Pasar / gapoktan)	20 Dokumen	200.000.000,00	APBD KAB	Rekomendasi Keamanan Pangan di Fokuskan Pada daerah Penghasil Pangan Segar : Pengawasan Keamanan PSAT (Pangan Segaran Asal Tanaman) Pre Market merupakan pengawasan pendahuluan yang dilakukan sebelum suatu produk beredar di masyarakat, antara lain pengawasan produk hasil pertanian (segar dan olahan primer) Pengawasan keamann PSAT pre market dilakukan dalam bentuk inspeksi pemenuhan persyaratan keamanan pangan dalam rangka pemberian: a. Sertifikasi (Prima, GAP, GHP, GMP, dll); Masuk dalam aksi Bangda Dalam Percepatan Penurunan Stunting	1 Dokuemn	50.000.000,00
2.09.05.2.01.06	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	20 Kecamatan (20 Pasar / gapoktan)	20 Dokumen	300.000.000,00	APBD KAB	Pembinaan Pengusaha Pangan Segar Asal Tumbuhan untuk Mendapatkan Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar dengan cara melakukan fasilitasi : Pengawasan Keamanan PSAT Post-Market merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan setelah suatu produk beredar di masyarakat.. Kegiatan ini Masuk dalam Aksi Bangda dalam Rangka Aksi Penurunan Stunting.	2 Dokumen	75.000.000,00
2.09.05.2.01.07	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	20 Kecamatan	1 Dokumen	100.000.000,00	APBD KAB	Usulan Tambahan Anggaran digunakan untuk Penyediaan sarana Pengujian Keamanan Pangan (rapit Test) . Kegiatan ini Masuk dalam Aksi Bangda dalam Rangka Aksi Penurunan Stunting	4 Dokumen	75.000.000,00
2.09.05.2.01.08	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal Tumbuhan	20 Kecamatan	20 Laporan	150.000.000,00	APBD KAB	Tambahan Anggaran digunakan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan di 20 Kecamatan yang bertujuan mengiden- tifikasi serta memverifikasi data base petani hortikultura/produsen/retail/ warung/umkm dan Koordinasi Instansi Pembina di Provinsi Kaltim	4 Laporan	50.000.000,00
2.09.05.2.01.09	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Marang kayu, Kota Bangun, sebulu, Muara Jawa , Muara Badak	8 Dokumen	400.000.000,00	APBD KAB	Tambahan Anggaran diajukan dalam Penguatan Kelembagaan pangan Segar dengan Menyusun SOP tentang kebijakan di Bidang Keamanan Pangan serta pembentukan OKKPD Penguatan Kelembagaan pangan, Aksi Bangda dalam Rangka Aksi Penurunan Stunting	4 Dokumen	50.000.000,00
			TOTAL		**76.120.164.434,00**				**10.877.786.621,00**

BAB V
PENUTUP

Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara menggambarkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Ketahanan Pangan terutama peningkatan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat.

A. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan nya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

   Dalam rangka pelaksanaan renja yang telah disusun dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan di Kutai Kartanegara visi dan misi Kepala Daerah, dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, kemauan dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan seluruh Stakeholder. Apabila didalam pelaksanaannya anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan dilakukan skala prioritas dalam melaksanakan kegiatan.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

   Dalam pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 berpedoman pada :

   1) Hasil-hasil yang dicapai pada periode 2023,
   2) Permasalahan dan tantangan yang dihadapi, dan
   3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

C. Rencana Tindak Lanjut.

   Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta efisiensi anggaran dalam menunjang pembangunan di daerah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di masing-masing bidang untuk Tahun berjalan, sehingga apabila terjadi perubahan terkait ketersediaan anggaran dan lainnya bisa segera disesuaikan sesuai dengan prioritas pembangunan dan kesiapan bidang bidang dalam melaksanakan program dan kegiatan, sehingga Renja Tahun 2023 dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan

aturan yang berlaku.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga menghasilkan sinergitas dalam pelaksanaan Program dan kegiatan dalam pembangunan Ketahanan Pangan.

x.RENJA DINAS PETERNAKAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiridari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap Penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Dinas Pertanian dan peternakan Tahun 2021-2026. Dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPDTahun 2025. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan serta sejalan dengan visi dan Misi Rencana pembangunanjangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2024 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025. Sedangkan tujuan disusunnya Renja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan RENJA Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

berisi tentang :Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERA

berisi tentang :Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja OPD, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang : Program dan Kegiatan.

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 sebesar Rp251.750.577.444,- terdiri dari 6 program,18 Kegiatan dan 62 Sub Kegiatan. Sedangkan pada DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 anggaran bertambah menjadi Rp.351.062.659.581,-, dengan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan tidak mengalami perubahan. Dari pagu renja perubahan tersebut, sebesar Rp71.511.267.444 merupakan belanja non urusan dan Rp180.239.310.000 merupakan belanja urusan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp314.052.214.080,- atau 89,46 % sedangkan realisasi fisik sebesar 100%.

Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 didukung oleh 6 (enam) program, dimana terdapat program yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target dan melebihi target, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, yaitu :

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Luas Tanam Padi (Ha)	40.254,24	20.941	52,02 %
		Luas Tanam Jagung (Ha)	7.500	2.082	27,76 %
		Luas Tanam Palawija (porang) (Ha)	35	0	0%
		Luas Tanam Hortikultura (Ha)	26.987,26	27.607,40	102,30 %
		Peningkatan Populasi Ternak Besar (Ekor)	35.275	26.360	74,73 %
		Peningkatan Populasi Ternak Kecil (Ekor)	26.987,26	14.901	55,21 %
		Peningkatan Populasi Ternak Unggas (Ekor)	16.415.000	5.369.052	32,71 %
2	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (persen)	85	75,54	88,87%

3	Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani (persen)	3	1,1	36,67 %
4	Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan (surat)	20	15	75 %

2. Realisasi program yang melebihi target kinerja yang direncanakan, yaitu :

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Panjang Jalan Usaha Tani Yang Dibangun (meter)	33000	78110	236,70 %
		2. Jumlah Embung Yang Dibangun (unit)	23	26	113,04 %
2	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	63,5	102,42 %

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program :

A. Faktor penyebab target program yang tidak tercapai target kinerjanya antara lain :

a. Input produksi kurang maksimal terutama pupuk (karena alokasi pupuk subsidi tidak mencukupi kebutuhan dan harga pupuk non subsidi cukup mahal).

b. Terjadi musim kemarau yang cukup panjang yaitu dari blan juni sampai bulan desember 2023, sehingga kebutuhan air untuk setor pertanian tidak tercukupi dan menyebabkan terjadinya penurunan luas tanam yang cukup signifikan serta gagal panen (puso).

c. Adanya kegiatan aktivitas lain pada sebagian sekitar lahan pertanian yang dapat menyebabkan menurunnya kwalitas air dan media tanam, sehingga petani enggan untuk melakukan penanaman karena dikhawatirkan terjadi kegagagalan.

d. Adanya pilihan pekerjaan dan peluang usaha lainya yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih besar.

B. Sedangkan faktor penyebab target program melebihi target kinerja program adalah :

a. Pekerjaan perkerasan jalan usaha tani dan pembuatan Pembangunan embung berjalan relatif lancar dan cepat karena cuaca yang mendukung (kondisi panas), bahan/material dan peralatan kerja relatif tersedia serta

tidak menghadapi kendala yang signifikan dalam penyiapan lokasi. Selain itu system pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan usaha tani adalah swaklola dengan Kodim 0906/Kutai Kartanegara dan Kodim 0908/Bontang serta dukungan dari Lembaga petani dan pemerintah desa yang cukup baik.

b. Nilai SAKIP melebihi target antara lain karena motivasi dan Kerjasama internal jajaran Dinas Pertanian dan Peternakan yang semakin tinggi, pengetahuan dan pemahaman pegawai semakin baik serta pendampingan dari Inspektorat Kabupanten Kutai Kartanegara dan BPKP Kalimantan Timur.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

   Dengan adanya capaian program Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023 implikasi yang timbul adalah diperlukannya : (1) Penetapan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai antisipasi alih fungsi lahan komoditas tanaman pangan dan hortikultura, (2) Pengendalian serangan OPT perlu dilakukan secara cepat sehingga kerusakan yang ditimbulkannya dapat dikurangi, dan (3) Penambahan kuota pupuk subsidi komoditas.

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

   1) Peningkatan penyediaan sarana produksi tanaman dan hortikultura berupa benih, pupuk, pestisida dan alat/mesin pertanian.
   2) Peningkatan penyediaan prasarana pertanian, terutama prasarana irigasi dan konektivitas jaringan irigasi antara primer, sekunder dan tersier.
   3) Penyediaan sumber-sumber air irigasi yang berasal dari air tanah.
   4) Peningkatan penyuluhan pertanian dan pengembangan petani milenial.
   5) Pengembangan kemitraan usaha pertanian yang produktif dan sehat dan pengolahan hasil pertanian.

Adapun capaian kinerja dari program dan kegiatan pembangunan pertanian dan peternakan diimplementasikan melalui kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel T-C.29. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan PeternakanKabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, dibawah ini :

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Kutai Kartanegara

Daerah : Dinas Pertanian dan Peternakan											
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.27.01.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan		66 Nilai	66 Nilai	68 Nilai	68 Nilai		69 Nilai		
3.27.01.2.01.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	13	Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen		13 Desember		
3.27.01.2.01.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	2	1	1	100	1	4	80

3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	2	0	0	0	0	2	200
3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	Dokumen	-	0	0	0	0	-	-
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	-	0	0	0	0	-	-
3.27.01.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dokumen	-	1	1	100	1	2	200
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	2	3	3	100	1	6	200
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	85	85						-	-

3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	481	Orang/ Bulan	481	481	481	100	481	1.443	300
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15	Dokumen	34	15	15	100	34	83	553
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	1	1	100	1	3	300
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	Laporan	-	16	16	100	200	216	1.350
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1	Dokumen						-	-
3.27.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1	1	1	100	1	3	300
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2	Dokumen	-					-	-

3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	481	Paket	-	481	481	100	481	962	200
3.27.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	481	Dokumen	-	481	481	100	481	962	200
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	25	10	10	100	25	60	600
3.27.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15	Orang	10	15	15	100	10	35	233
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	Layanan						-	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	Paket	5	7	7	100	5	17	243
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Paket	130	20	20	100	130	280	1.400
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	10	4	4	100	10	24	600
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	3	Paket	4	3	3	100	4	11	367

		Penggandaan yang Disediakan									
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2000	Dokumen	100	2.000	2.000	100	100	2.200	110
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400	Laporan	400	400	400	100	220	1.020	255
3.27.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	650	Dokumen	10	650	650	100	10	670	103
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	50	Unit	-	-	-			-	-
3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit		1	1	100	1	2	200
3.27.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	-	1	1	100	1	2	200
3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	-	1	1	100	1	2	100
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan						-	-

3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	-	12	12	100	12	24	200
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	250	12	12	100	12	274	2.283
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	67	12	12	100	12	91	758
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	75	12	12	100	12	99	825
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	340	Unit						-	-
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	-	2	2	100	2	4	200
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	215	Unit	2	2	2	100	150	154	72

		dibayarkan Pajak dan Perizinannya									
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75	Unit	222	215	215	100	5	442	589
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48	Unit	5	75	75	100	33	113	235
	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN										
		Luas Tanam Padi	4180248	Ha						-	-
		Luas Tanam Jagung	20000	Ha	39.867,18	40.254,24	40.254,24	100		80.121	401
		Luas Tanam Palawija (porang)	55	Ha	3.000,00	7.500,00	7.500,00	100		10.500	19.091
		Luas Tanam Hortikultura	292782436	Ha	25,00	35,00	35,00	100		60	
		Peningkatan Populasi Ternak Besar	37061	Ekor	26.197,87	26.987	26.987	100		53.185	144
		Peningkatan Populasi Ternak Kecil	1844030	Ekor						-	-
		Peningkatan Populasi Ternak Unggas	17414000	Ekor	34.416,00	35.275	35.275	100		69.691	0
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Unit Sarana Pertanian yang Dimanfaatkan	10984	Unit						-	-

3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	5	Laporan	15.936.000,00	16.415.000	16.415.000	100	5	32.351.005	647.020.100
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian								-	
		Jumlah Luasan Lahan yang dikelola UPT/BPP	3	Unit	-	-	-		3		-
		Jumlah Alsintan yang diadakan	3012	Unit	-	5	5	100	3247	3.252	108
		Pengadaan Sarana Produksi Pertanian	1300	Ha	28	7	7	100	1300	1.335	103
		pengadaan benih padi	3600	Ha	-	-	-		3600		-
		Pengembangan Tanaman Jagung	3000	Ha	-	5	5	100		5	0
		Jumlah Luasan Palawija (Porang)	14	Ha	40	5	5	100		45	321
		Pengembangan Tanaman Hortikultura	50	ha	-	5	5	100	100	105	210
		Pengadaan Alsintan Rotavator (POKIR)								-	
		Pengadaan Alsintan (Musrenbang)			-	-	-			-	
		Pengadaan Green House			-	-	-			-	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik	31	Komoditi	-	-	-			-	-

	Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	(SDG) Hewan dan Tumbuhan									
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	5	VUB	-	5	5	100	3	8	160
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	5	Dokumen	-	5	5	100	5	10	200
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	5	Dokumen	-	5	5	100	5	10	200
			15.000.000		-	-	-			-	-
			1.741.000		-	-	-			-	-
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengawasan	2	Jenis	-					-	-
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	4	Laporan		4	4	100	4	8	200
3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan Benih/Bibit Hijauan	4	Laporan	850 1000	322	322	100	4		-

	Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Pakan Ternak yang Beredar									
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengendalian dan pengawasan	2	Data Pengawasan	30000 50000						-
3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	2	Ekor		2	2	100	15	17	850
3.27.02.2.05.02	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	2	Dokumen		2	2	100	100	102	5.100
3.27.02.2.05.03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	2	Ekor		2	2	100	50	52	2.600
3.27.02.2.05.04	Penjaminan Peredaran HPT Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	1	Ton		1	1	100	1	2	200
3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT Bahan Pakan/Pakan	3	Laporan	1	3	3	100	15	19	633
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Benih/Bibit Ternak	322	Ekor						-	-
		Tersedianya Hijauan Pakan ternak	2	Stek/Pols						-	-

	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain								-	
		Pengadaan bibit Ternak Sapi	92	Ekor	10	20	20	100	92	122	133
		Pengadaan bibit Ternak Kambing	160	Ekor	15	23	23	100	200	238	149
		Pengadaan bibit Ternak Kerbau	20	Ekor	33	33	33	100	20	86	430
		Pengadaan bibit Ternak babi	50	Ekor	3	5	5	100	50	58	116
3.27.02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2	Ton	5	5	5	100	15000	15.010	750.500
	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Panjang Jalan Usaha Tani yang dibangun	12500	Meter	-	1	1	100		1	0
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan	1	Dokumen						-	-
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1	Dokumen		1	1	100	1	2	200

3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	18	Laporan	10	18	10	55,55555556	24	44	244
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	97	Unit						-	-
3.27.03.2.02.01	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	10000	Unit		12500	12500	100	12500	25.000	250
3.27.03.2.02.02	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	21	Unit		23	23	100	23	46	219
3.27.03.2.02.03	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	12500	Unit		33000	33000	100	20000	53.000	424
3.27.03.2.02.04	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	4	Unit	80	5	5	100	5	90	2.250
3.27.03.2.02.06	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	19	Unit	-	33	33	100	33	66	347
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	1	Unit	-	1	1	100	1	2	200
3.27.03.2.02.08	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang	2	Unit		15	15	100	15	30	1.500

		Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara									
3.27.03.2.02.09	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara			-	3	3	100		3	
		Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan kandang	30	Unit	-	-	-		33	33	110
		Jumlah dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kalang	30	Unit					3	3	10
		Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan pagar pembatas	25000	Meter	-	2	2	100	4500	4.502	18
		Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan gang way	23	Unit	-	2	2	100		2	9
		Luas cetak sawah baru dan optimasi lahan Rawa	11	ha						-	-
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Persentase Derajat Kesehatan Ternak (jumlah kasus penyakit dibagi populasi)	96	Persen	-	1	1	100		1	1
		2. Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan (Ternak yang akan dipotong daging telur susu	5	Jumlah/ Jenis Produk Hewan	-	2	2	100		2	40
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah	100	persen						-	-

	Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	kasus penyakit hewan menular									
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	65	Laporan		65	65	100	80	145	223
3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	150	Laporan	18 3000	2000	2000	100	80		-
3.27.04.2.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	2	Laporan	-	2	2	100	80	82	4.100
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan	2	Jenis	-	-	-			-	-
3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	3	Laporan	-	3	3	100	3	6	200
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	2	Jenis						-	-

3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	2	Laporan		2	2	100	2	4	200
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2	Laporan	-	2	2	100	2	4	200
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Teknis Kesmavet	3	Jenis						-	-
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	7	Laporan	-	35	35	100	40	75	1.071
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	30	Laporan		15	15	100	200	215	717
3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	70	Dokumen		15	15	100	15	30	43
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	CAKUPAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	95	Persen						-	-
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Pengendalian OPT Pertanian	2400	Ha						-	-
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	2000	Ha	18	5	5	100	3000	3.023	151

3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani	200	Ha	-	313	313	100	313	626	313
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	18	Ha	-	2	2	100	2	4	22
3.27.05.2.01.04	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat *Zoonosis*	95	Laporan	95 Laporan	5	5	100	6	16	17
3.27.05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan	200	Laporan	200 Laporan	400	400	100	400	1.200	600
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	35	Rekomendasi	35 Rekomendasi						-
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	20	Surat	20 Surat						-

3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	20	Laporan	20 Laporan	40	40	100	40	120	600
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan Rumah Potong Hewan	Jumlah Penerbitan Izin Usaha ternak	15	Dokumen	15 Dokumen						-
3.27.06.2.02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan Rumah Potong Hewan	15	Dokumen	15 Dokumen	2	2	100	2	6	40
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan kelompok tani naik kelas	4	Persen	4 Persen						-
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Lembaga Petani yang dibina	95	Persen	95 Persen						-
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25							-	-
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan di kecamatan dan Desa/kelurahan (BPP Posluhtan Taman	73	Kelembagaan Penyuluh	73 Kelembagaan Penyuluh	73	73	100	26	172	236

		Teknologi Pertanian dan Peternakan) Penyuluhan									
		Pertanian Desa/Kelurahan Kecamatan dan Kabupaten	19	BPP	19 BPP	13	13	100	19	45	237
		Rapat Teknis BPP	19	BPP	19 BPP	13	13	100	19	45	237
		Pelatihan Dasar Penyuluh ASN dan Swadaya	100	Orang	100 Orang	100	100	100	100	300	300
		Pelatihan Teknis Bagi Penyuluh	100	Orang	100 Orang	100	100	100	100	300	300
		Pembinaan dan Supervisi Penyuluh Pertanian	19	BPP	19 BPP	13	13	100	19	45	237
		Pengembangan dan Penumbuhan Pos Penyuluhan Desa/kelurahan	80		80	80	80	100	70	230	288
		Pengembangan dan penumbuhan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S)	6	P4S	6 P4S	6	6	100	5	17	283
		Pelaksanaan Diseminasi Teknologi di Taman Teknologi Pertanian Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang	1	TTP	1 TTP	1	1	100	1	3	300
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya								-	

		Jumlah Kelembagaan Petani yg mendapatkan pelatihan/Pembinaan/ pendampingan/penumbuhan	2743	Kelembagaan Petani	2743 Kelembagaan Petani	2743	2743	100	2510	2.743	100
		Pembinaan dan Penumbuhan Kelompok Tani	2550	Kelompok Tani Dewasa	2550 Kelompok Tani Dewasa	2550	2550	100	2500	2.743	108
		Pembinaan dn Penumbuhan Kelompok Wanta Tani	195	Kelompok Wanita Tani	195 Kelompok Wanita Tani	135	135	100	180	2.743	1.407
		Pembinaan dan penumbuhan Kelompok Taruna Tani (Petani Milenial)	40	Kelompok Taruna Tani	40 Kelompok Taruna Tani	40	40	100	40	2.743	6.858
		Fasilitasi dan Pendampingan Kelompok KTNA (Menghadiri Rembug Peda dan Penas)	1	KTNA	1 KTNA	1	1	100	1	2.743	274.300
		Pembinaan dan penumbuhan Asosiasi Petani	2	Asosiasi Petani	2 Asosiasi Petani	2	2	100	2	2.743	137.150
		Pembinaan dan Penumbuhan Gapoktan	170	Gapoktan	170 Gapoktan	170	170	100	165	2.743	1.614
		Lomba Asah Terampil Petani	195	Kelompok Tani	195 Kelompok Tani	135	135	100	180	2.743	1.407

		Kontes Produk Pertanian	40	Kelompok Tani	40 Kelompok Tani	40	40	100	35	2.743	6.858
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian									
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan yang mendapatkan sarana/prasarana Penyuluhan Pertanian	5	Kelembagaan Penyuluhan	5 Kelembagaan Penyuluhan	5	5	100			-
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian di BPP	19	BPP	19 BPP	13	13	100	13	39	205
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian di Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan	80	Posluhdes	80 Posluhdes	80	80	100	19	179	224
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian di Pusat pelatihan Perdesaan Swadaya (P4S)	6	P4S	6 P4S	6	6	100	5	17	283
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian di Tama	1	TTP	1 TTP	1	1	100	1	3	300

		Teknologi Pertanian (TTP) Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang									
		Pembangunan Pondok Pertemuan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan	5	Posluhdes	5 Posluhdes	5	5	100	5	15	300
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk								-	
		Jumlah Penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani								-	
		Pembinaan dan Pendampingan Kios Saprodi	179	Kios Saprodi	179 Kios Saprodi	173	173	100	164	510	285
		Pengembangan dan Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA)	126	LKMA	126 LKMA	126	126	100	121	373	296
		Pengembangan dan penumbuhan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)	37	UPJA	37 UPJA	37	37	100	32	106	286

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebanyak 4 (empat) Indikator Kinerja, yaitu :

1. Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian
2. Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian
3. Meningkatnya Produksi Peternakan
4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Adapun target dan capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada Tabel :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan

Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan			B	B	B	B	B	B	BB	A	
	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang di tindak lanjuti			100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Produktivitas (Ton/Ha)											
	Padi			3,79	3,96	4,16	4,39	398	4,10	4,16	4,39	
	Jagung			5,81	6,08	6,38	6,74	4,76	5,08	5,40	6,00	Target tidak tercapai karena terjadi kemarau yang cukup panjang, sehingga tanaman tidak optimal pertumbuhannya
3	Produksi (Ton)											
	Padi			118.705,80	119.815,20	120.924,60	122.034,00	106.411,09	110.815	116.125	120.500	Target tidak tercapai karena terjadi kemarau yang cukup panjang, sehingga terjadi penurunan luas tanam dan sebagian mengalami gagal panen
	Jagung			54.246	86.895	131.463	199.317	7.178,7	9.750	10.750	11.850	Target tidak tercapai karena terjadi kemarau yang cukup panjang, sehingga terjadi penurunan luas

												tanam dan sebagian mengalami gagal panen

No.	Indikator	SPM/	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Standar Nasional		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Palawija (Porang)			385	540	715	910	0	0	0	0	Target tidak tercapai disebabkan karena petani tidak tertarik menanam porang karena harga produksi kurang menjanjikan
	Hortikultura			108.320	110.126	112.008	113.960	70.490	110.126	112.008	113.960	Target tidak tercapai karena terjadi kemarau

												yang cukup panjang, sehingga terjadi penurunan luas tanam dan sebagian mengalami gagal panen
4	Produksi (Kg)											
	Daging			14,317,000	14,603,000	15,000,000	15.200.000	21.512.869	21,603,000	21,750,000	21.900.000	
	Telur			1,641,000	1,691,000	1,741,000	1.794.000	3.746.759	3.810.750	3,920,900	3.992.500	
5	Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan			101.07	104.11	107.44	111,09	101,61	104.11	106.44	107,09	Data Statistik (BPS) NTP tanaman pangan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Isu-isu penting akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir, adapun Isu Strategis Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH	
Penentuan	Isu-Isu Strategis
Alih Fungsi Lahan Pertanian	Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangan terhadap PDB, penyedia lapangan kerja dan penyedia pangan dalam negeri. Kesadaran terhadap peran tersebut menyebabkan sebagian besar masyarakat masih tetap memelihara kegiatan pertanian mereka. Sehubungandengan itu, pengendalian lahan pertanian merupakan salah satu kebijakan nasional yangstrategis untuk tetap memelihara industri pertanian primer dalam kapasitas penyediaanpangan, dalam kaitannya untuk mencegah kerugian sosial ekonomi dalam jangka panjang mengingat sifat multi fungsi dari lahan pertanian. Perkembangan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang terus meningkat dari tahun ke tahun maka permintaan produk pertanian terutama pangan juga semakin meningkat. Hal ini menimbulkan permasalahan karena kapasitas sumberdaya lahan menurun. Luas lahan pertanian semakin menurun karena pembukaan lahan baru sangat terbatas, banyak petani yang bekerja di luar sektor pertanian (alih profesi) karena memiliki upah kerja yang cukup menjanjikan, adanya eksploitasi lahan yang cukup luas di bidang pertambangan dan perkebunan sehingga menyebabkan Sebagian lahan pertanian tidak dapat ditanamai sebagi dampak dari kegiatan terrsebut (lahan menjadi cepat banjir apabila terjadi hujan dan menjadi cepat kering apabila terjadi panas serta menurunnya kwalitas air dan media tanam).
Perubahan Iklim	Terjadinya kerusakan lingkungan akan menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang berdampak global. Hal ini akan membawa pengaruh terhadap ketersediaan air permukaan maupun air bawah tanah yang cenderung berkurang. Pada sisi lain perubahan iklim juga menyebabkan curah hujan yang tinggi, sehingga terjadi pergeseran musim tanam, munculnya serangan OPT, dan lain sebagainya, yang akan berdampak pada penurunan hasil produksi tanaman yang diusahakan pada tahun berjalan. Menghadapi perubahan iklim dalam kaitan dengan perkembangan hama dan penyakit tanaman diperlukan beberapa langkah yang sesuai. Kajian komperehensif dampakperubahan iklim terhadap hama dan penyakit tanaman perlu dilakukan untuk menentukanlangkah yang tepat bagi pemerintah maupun petani. Selain itu diperlukan

	peningkatanpemahaman agro ekosistem oleh petani sehingga lebih cermat mengamati dan menyikapi perubahan yang ada.
Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar, dan permodalan serta perlindungan usaha tani	Usaha pertanian rakyat berskala kecil dan tersebar serta keterbatasan dalam menyediakan agunan mengakibatkan penyerapan pembiayaan usaha kecil dibidang pertanian terutama tanaman pangan relatif rendah. Disisi lain kelembagaan kelompok usaha tani yang belum solid serta tingkat pendidikan petani yang relatif rendah juga merupakan faktor pembatas dalam penyusunan proposal dan mengelola administrasi keuangan yang merupakan pra syarat dalam pengajuan pinjaman ke perbankan. Sehingga perlu upaya untuk mendorong keberpihakan pemerintah dan perbankan agar memberikan kredit program dan kredit komersial berbunga rendah. Keterbatasan modal merupakan permasalahan yang paling umum terjadi dalam usaha, terutama bagi usaha kecil seperti usahatani. Ciri khas dari kehidupan petani adalah perbedaan pola penerimaan, pendapatan, dan pengeluarannya. Dalam usaha tani permasalahan tersebut menjadi lebih kompleks antara lain karena persyaratan untuk memperoleh kredit formal sulit dipenuhi oleh petani, risiko usaha tani yang tinggi, dan adanya tenggang waktu lama untuk menunggu hasil. Masalah utama dalam penyediaan kredit ke petani adalah adanya jurang pemisah antara penyaluran dengan penerimaan kredit. Banyak lembaga permodalan dengan berbagai sistem kreditnya ditawarkan ke petani, tetapi pada kenyataannya hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat tertentu sedangkan petani kecil masih tetap kesulitan.
Pengembangan Kawasan Strategis Pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan dilengkapi dengan sarana dan prasarana	Kebijakanpengembangan kawasan pertanian untuk memproduksi komoditas unggulan yang berbasis klaster, dimana pendekatan ini dimaksudkan untuk memadukan serangkaian program dan kegiatan pembangunan pertanian menjadi suatu kesatuan yang utuh baik dalam perspektif system maupun kewilayahan, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas, wilayah serta pada gilirannya kesejahteraan petani sebagai pelaku usaha tani. Peraturan Menteri Pertanian No 50 Tahun 2012 merupakan upaya untuk mewujudkan pengembangan komoditas strategis berbasis kawasan secara berkelanjutan yang membutuhkan perencanaan kinerja pengembangan komoditas yang dapat mengakselerasi potensi daya saing komoditas dan wilayah melalui optimalisasi sinergitas pengembangan komoditas (multiple cropping system dan crop livestock system), keterpaduan lokasi kegiatan dan keterpaduan sumber pembiayaan. Keterpaduan pengembangan komoditas yang didukung secara horisontal dan vertikal oleh segenap pelaku dan pemangku kepentingan dalam suatu hamparan kawasan sentra produksi yang berskala ekonomis mensyaratkan suatu pendekatan yang berbentuk klaster (cluster). Mengingat pengembangan komoditas strategis berbasis kawasan masih sangat terbatas kalaupun tidak dapat dikatakan masih relatif belum ada, maka pengembangan komoditas strategis berbasis kawasan perlu dilakukan.

	Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat esesialbagi system produksi pertanian. Air bagi pertanian tidak hanya berkaitan dengan aspek produksi, melainkan juga sangat menentukan potensi perluasan areal tanam (ekstensifikasi), luas areal tanam, intensitas pertanaman (IP), serta kualitas hasil.Pengelolaan sumberdaya air adalah aktivitas perencanaan, pengembangan, distribusi, dan pengaturan agar sumberdayaair digunakan secara optimum dalam memenuhi berbagai keperluan. Embung dan waduk merupakan bangunan air yang banyak dibangun sebagai salah satu solusi dalam berbagai masalah yang berhubungandengan sumber daya air, baik pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian. Pembangunan waduk, embung dan jaringan irigasi memang mempunyai manfaat yang banyak bagi masyarakat sesuai peruntukannya. Kondisi saat ini menunjukkan masih terbatasnya jumlah waduk dan embung serta pengelolaan irigasi masih belum optimal.
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRBKabupaten Kutai Kartanegara	Produktivitas sektor pertanian dalam arti luas, dengan indikator sasaran Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB cukup tinggi, meskipun Target RPJMD belum sepenuhnya tercapai. Adapun kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun 2010 adalah 7,65 triliun rupiah dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 11,14 triliun rupiah. Pembangunan pertanian masih jalan ditempat, dan belum bisa meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku produksi, seperti petani, pekebun, pembudidaya ikan, peternak dan pelaku lainnya terkait.Kedepan penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi daerah berdasarkan pada kekhasan daerah (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah)
	Keberadaan dan berfungsinya infrastruktur jalan usaha tani merupakan prasyarat bagi kelangsungan proses produksi pertanian. Saat ini jaringan jalan produksi dan jalan usahatani dari dan ke sentra produksi pertanian masih sangat terbatas, alat dan mesin pertanian kesulitan keluar masukke daerah pertanian untuk membawa sarana produksi maupun memasarkan hasil pertanian secara efisien. Peranan infrastruktur Pertanian dalam pembangunan pertanian semakin strategis dan penting, hal ini sangat berkaitan dengan upaya pencapaian sasaran program khususnyaprogram peningkatan nilai tambah. Infrastruktur Pertanian khususnya jalan usaha tanimerupakan salah satu komponen dalam subsistem hulu yang diharapkan dapat mendukung subsistem jalan usaha tani, subsistem pengolahan dan subsistem pemasaran hasil pertanian(tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan). Pada saat ini banyak lokasi lahan pertanian belum mempunyai/terdapat jalan usaha tani yang memadai sehingga dapat menghambat masyarakat tani dalam berusaha dilahannya. Didalam UU No. 38Tahun 2004 tentang jalan terdapat klausul jalan khususnya yaitujalanyang pembangunan dan pembinaannya merupakan tanggung jawab departemen terkait.
	Unsur yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani adalah tingkat pendapatan petani. Nilai pendapatan petani dapat bersumber dari usaha pertanian dan usaha non pertanian. Nilai pendapatan diperoleh dari selisih nilai penjualan komoditas usahatani yang dihasilkan dengan biaya usahatani yang dikeluarkan. Nilai penjualan akan ditentukan oleh volume produksi yang dihasilkan serta hargajual. Hal fundamental yang perlu diupayakan dalam rangka peningkatan nilai jual adalah mempertahankan agar harga jual tidak mengalami penurunan. Salah satu indikator/alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan petani adalah indeks Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan ukuran kemampuan daya beli/daya tukar petani terhadap barang yang dibeli petani. Peningkatan nilai tukar petani menunjukkan peningkatan kemampuan riil petani dan mengindikasikan peningkatan kesejahteraan petani, atau sebaliknya.Pengetahuan secara

	mendalam tentang perilaku nilai tukar petani, dampak pembangunan, dan identifikasi faktor-faktor penentu nilai tukar akan sangat berguna bagi perencanaan kebijakan pembangunan, perbaikan program-program pembangunan ke depan.
Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Jagung, Palawija dan Hortikultura	Kondisi produksi dan produktivitas komoditas pertanian yang diproduksi petani masih jauh dibawah potensi genetiknya karena belum sepenuhnya diterapkannya aplikasipaket teknologi sesuai anjuran. Disisi lain perlu dilakukan upaya peningkatan mutumelalui penerapan GAP (Good Agriculture Practice). Selain itu untuk mengurangi biaya pembelian sarana produksi seperti pupuk dan pestisida kimia serta menjaga produktivitas lahan dan air maka perlu diterapkan teknologi pertanian organik yangramah lingkungan, penerapan system pengendalian hama terpadu, pembukaan lahan tanpa bakar, optimalisasi lahan dan konservasi di lahan kering.
Produksi dan kualitas Ternak ruminansia masih rendah	Populasi ternak ruminansia masih rendah dikarenakan tingkat kepemilikan ternak masih sedikit, mutu pakan ternak rendah, tingkat kematian masih tinggi dan masih sering terjadi serangan penyakit. Mutu genetic cenderung menurun dikarenakan terjadi kawin dalam (inbreeding).

TANTANGAN

1. Kemampuan petani dalam penerapan paket teknologi masih rendah.
2. Infrastruktur & prasarana pengembangan pertanian belum memadai.
3. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.
4. Dampak perubahan fenomena iklim dan gangguan OPT terhadap peningkatan produksi.
5. Kurangnya minat pemuda untuk kegiatan usaha tani.

PELUANG

1. UU No. 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.
2. Pengembangan pertanian tanaman pangan merupakan skala prioritas dalam program KUKAR IDAMAN (Inovatif, DAya Saing dan MANdiri).
3. Memiliki Potensi peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan.
4. Peluang pasar dan kemitraan agribisnis cukup besar.
5. Tersedia sumberdaya kelompok masyarakat petani sebagai pelaku pembangunan pertanian.
6. Adanya program percepatan modernisasi pertanian.

Sedangkan Formulasi Isu-isu penting berupa rekomendasi dalam perumusan Program dan Kegiatan pada Tahun yang direncanakan adalah :

Strategi (Prioritas)	Kebijakan	Arah Kebijakan				
		2022	2023	2024	2025	2026
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kepastian ketersediaan lahan pangan berkelanjutan					
	Mengembangkan Pertanian berbasis kawasan					
	Perbaikan sistem pertanian dari hulu sampai hilir					
	Dukungan sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura					
Peningkatan Produksi Dagingdan Telur serta Populasi Ternak	Mengembangkan peternakan pola integrasi					
	Peningkatan pengamatan, penyidikan dan pengendalian PHM Strategis					
	Penerapan Teknologi Peternakan					
Meningkatkan manajemen usaha tani dan meningkatkannilai tambah serta daya saing komoditas pertanian	Meningkatkan kualitas sumber daya petani					
	Mempermudah akses permodalan					
	Hilirisasi produk pertanian					

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rancangan Awal Renja dan Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan, Dikaitkan dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026 serta urusan Pertanian dan Peternakan, maka fungsi dan tugas Dinas Pertanian dan Peternakan terkait erat dengan pencapaian Misi ke-3 yaitu *Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*.

Proyek strategis pembangunan daerah merupakan proyek yang dapat mendukung visi, misi dan program kepala daerah terpilih, setiap proyek strategis daerah dijabarkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-

masing OPD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui “Program Dedikasi KUKAR IDAMAN” dengan proyek strategis pembangunan daerah bagi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yaitu Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Berbasis Kawasan, dengan jenis komoditas yang dikembangkan adalah Padi, Jagung, Sayur-sayuran, dan Buah-buahan. Adapun kawasan yang sudah ditetapkan adalah mencakup 5 (lima) kawasan, dengan luas Keseluruhan + 8.093,06 Ha, terdiri dari :

1. Kawasan Pertanian Kecamatan Sebulu-Muara kaman dengan luasan sebesar 1.519,4154 Ha;
2. Kawasan Pertanian Kecamatan Tenggarong – Loa Kulu dengan luasan sebesar 1.193,1352 Ha;
3. Kawasan Pertanian Kecamatan Tenggarong Seberang I dengan luasan sebesar 2.010,2623 Ha;
4. Kawasan Pertanian Kecamatan Tenggarong Seberang II dengan luasan sebesar 2.295,3461 Ha;
5. Kawasan Pertanian Kecamatan Marangkayu dengan luasan sebesar 1.081,3645 Ha;

Kegiatan Intervensi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan pada tahun 2025 terhadap 5 (lima) Kawasan tersebut maupun diluar kawasan antara lain meliputi :

a. Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Usaha Tani 39 unit (39 unit x 500 meter = 19.500 Meter);
b. Pembangunan embung pertanian (embung kecil) sebanyak 28 Unit;
c. Pembangunan Jalan Usaha Tani sebanyak 120 unit (500 meter x 120 unit = 60.000 meter);
d. Pembangunan DAM Parit 12 unit.
e. Penyediaan Sarana Produksi berupa Pupuk, Benih tanaman, Pestisida.
f. Pendampingan dan Penyuluhan Pertanian.
g. Penyediaan Hewan ternak dan Obat Hewan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renja awal dan hasil analisis kebutuhan, maka pada Renja Akhir Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2025, diperoleh hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak terdapat perubahan pada Program, Kegiatan, maupun Sub Kegiatan.

2. Terdapat Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang besarannya perlu penambahan yaitu :
    a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (4 Sub Kegiatan);
    b. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian (6 Sub Kegiatan);
    c. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (3 Sub Kegiatan);
3. Terdapat Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang besarannya berkurang yaitu :
    a. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian (3 Sub Kegiatan);
    b. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian (1 Sub Kegiatan);

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Akhir RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dibawah ini :

Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikato Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikato Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan	66 Nilai	66.822.181.827	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan	64 Nilai	66.822.181.827	
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	13 Dokumen	785.000.000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	9 Dokumen	785.000.000	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	350.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	350.000.000	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	35.000.000	

	Perubahan RKA-SKPD		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD			Perubahan RKA-SKPD		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD			
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000	
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	35.000.000	
1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	300.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	300.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	17 Dokumen	56.004.043.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	8 Dokumen	69.288.400.718	

			Perangkat Daerah yang Akuntabel					Perangkat Daerah yang Akuntabel			
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	481 Orang/bulan	55.335.606.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	481 Orang/bulan	68.399.963.718	Hasil Rekon 2023
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	360.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	580.000.000	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	48.437.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	48.437.000	
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	260.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	260.000.000	

3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	56.065.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	3 Dokumen	56.065.000	
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	56.065.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	56.065.000	Verifikasi Aset
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	1.053.167.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2	2.231.617.000	
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	481 Paket	481.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	1.659.450.000	
4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	481 Dokumen	481.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	481 Dokumen	74.936.000	
4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	74.936.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	481 Dokumen	481.000.000	Peningkatan SDM ASN

4.4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	16.231.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	16.231.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Layanan	1.626.122.755	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	16 Layanan	1.786.122.754	
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	47.076.700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	47.076.700	
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	776.582.055	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	776.582.054	Peningkatan Infrastruktur SDM ASN
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	245.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	260.000.000	banyaknya Pertemuan
5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	49.475.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	49.475.000	Penambahan Belanja Cetak

5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2000 Dokumen	24.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2000 Dokumen	24.000.000	Penambahan Referensi ASN
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	418.565.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	563.565.000	
5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	650 Dokumen	65.424.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	650 Dokumen	65.424.000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	50 Unit	992.350.480	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	5 Unit	6.967.707.000	
6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	300.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit	3.647.707.000	
6.2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	300.000.000	

6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	492.350.480	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	3.020.000.000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	4.772.757.592	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	5.742.757.592	
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.991.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.991.000	
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	654.084.564	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	654.084.564	Penyesuain TDL
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	95.832.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	95.832.000	Peningkatan Infrastruktur SDM ASN
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.020.850.028	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.990.850.028	Penambaha n BPJS THL

8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	340	1.532.676.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Barang Milik Daerah	340	1.882.676.000	
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	139.106.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	139.106.000	
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	215 Unit	698.570.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	219 Unit	698.570.000	Sewa Kendaraan Dinas
8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	200.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	200.000.000	Peningkatan Infrastruktur SDM ASN

8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48 Unit	495.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	845.000.000	Peningkatan Infrastruktur SDM ASN
II	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				13.540.000.000	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				13.540.000.000	
			Luas Tanam Padi	41.802 Ha	3.834.000.000			Luas Tanam Padi	41.802 Ha	3.834.000.000	
			Luas Tanam Jagung	20.000 Ha	2.913.000.000			Luas Tanam Jagung	20.000 Ha	2.913.000.000	
			Luas Tanam Palawija (porang)	55 Ha	610.500.000			Luas Tanam Palawija (porang)	55 Ha	610.500.000	
			Luas Tanam Hortikultura	29.278 Ha	2.452.500.000			Luas Tanam Hortikultura	29.278 Ha	2.452.500.000	
			Peningkatan Populasi Ternak Besar	37.061 Ekor	2.238.000.000			Peningkatan Populasi Ternak Besar	37.061 Ekor	2.238.000.000	
			Peningkatan Populasi Ternak Kecil	18.440 Ekor	1.119.000.000			Peningkatan Populasi Ternak Kecil	18.440 Ekor	1.119.000.000	
			Peningkatan Populasi Ternak Unggas	17.414.000 Ekor	373.000.000			Peningkatan Populasi Ternak Unggas	17.414.000 Ekor	373.000.000	
9	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Jumlah Unit Sarana Pertanian yang Dimanfaatkan	10.984 Unit	9.210.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Kutai	Jumlah Unit Sarana Pertanian yang Dimanfaatkan	10.984 Unit	45.005.000.000	

							Kartanegara				
9.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	5 Laporan	200.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	500.000.000	
9.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	44.505.000.000	
			Jumlah Luasan Lahan yang dikelola UPT/BPP	3	430.000.000			Jumlah Luasan Lahan yang dikelola UPT/BPP			
			Jumlah Alsintan yang diadakan	3012 Unit	3.250.000.000			Jumlah Alsintan yang diadakan	3598 Unit	16.500.000.000	
			Jumlah Saprodi yang diadakan	1.300 Ha	2.500.000.000			Pengadaan Sarana Produksi Pertanian	1.300 Ha	12.500.000.000	
			Jumlah Luasan benih padi yang diadakan	3.600 Ha	1.080.000.000			pengadaan benih padi	3.600 Ha	3.000.000.000	
			Jumlah Luasan Benih Jagung	3.000Ha	750.000.000			Pengembangan Tanaman Jagung	100Ha	3.500.000.000	

			Jumlah Luasan Palawija (Porang)	14 Ha	500.000.000			Jumlah Luasan Palawija (Porang)	14 Ha	-	
			Jumlah Luasan Benih Hortikultura	50 Ha	500.000.000			Pengembangan Tanaman Hortikultura	50 Ha	1.500.000.000	
								Pengadaan Alsintan Rotavator (POKIR)	1 Unit	325.000.000	
								Pengadaan Alsintan (Musrenbang)	1 Paket	680.000.000	
								Pengadaan Green House	3 Unit	6.500.000.000	
10	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan	31 Komoditi	600.000.000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan	31 Komoditi	750.000.000	10
10.1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	5 VUB	200.000.000	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	5 VUB	200.000.000	
10.2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	5 Dokumen	200.000.000	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	5 Dokumen	250.000.000	Laporan menjadi include 1 dokumen

10.3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	5 Dokumen	200.000.000	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	5 Dokumen	300.000.000	Laporan menjadi include 1 dokumen
			Daging	15.000.000							
			Telur	1.741.000							
11	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Pengawasan	2 Jenis	150.000.000	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Cakupan Pengawasan	2 Jenis		
11.1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	4 Laporan	75.000.000	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	4 Laporan	-	Tidak ada kewenanangan / Petugas Teknis (pengawas

											mutu pakan) yang berserti fikat
11.2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Kab. Kutai Kartaneg ara	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	4 Laporan	75.000.000	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak		Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	4 Laporan	-	Tidak ada kewena nangan / Petugas Teknis (penga was mutu pakan) yang berserti fikat
12	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pengendalian dan pengawasan	2 Data Pengawas an	275.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartaneg ara	Cakupan pengendalian dan pengawasan	2 Data Pengawas an	220.000.000	
12.1	Penjaminan Peredaran	Kab. Kutai	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	2 Ekor	55.000.000	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Kab. Kutai	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	20 Laporan	55.000.000	

	Benih/Bibit Ternak	Kartanegara					Kartanegara				
12.2	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Kab. Kutai Kartanegara	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	2 Dokumen	55.000.000	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Kab. Kutai Kartanegara	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	2 Dokumen	55.000.000	
12.3	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	2 Ekor	55.000.000	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	50 Laporan	55.000.000	
12.4	Penjaminan Peredaran HPT Bahan Pakan/Pakan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah HPT Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	1 Ton	55.000.000	Penjaminan Peredaran HPT Bahan Pakan/Pakan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah HPT Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	1 Ton	-	Tidak ada kewenangan / Petugas Teknis (pengawas mutu pakan) yang bersertifikat
12.5	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT Bahan Pakan/Pakan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT Bahan Pakan/Pakan	3 Laporan	55.000.000	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT Bahan Pakan/Pakan		Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT Bahan Pakan/Pakan	2 Laporan	55.000.000	

13	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Tersedianya Benih/Bibit Ternak	322 Ekor	3.205.000.000	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Kutai Kartanegara	Tersedianya Benih/Bibit Ternak	322 Ekor	15.110.000.000	
			Tersedianya Hijauan Pakan ternak	2 Stek/Pols	100.000.000			Tersedianya Hijauan Pakan ternak	2 Stek/Pols		
13.1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		14.955.000.000	
			Pengadaan bibit Ternak Sapi	92 Ekor	1.105.000.000			Pengadaan bibit Ternak Sapi	92 Ekor	4.485.000.000	Pemenuhan
			Pengadaan bibit Ternak Kambing	160 Ekor	800.000.000			Pengadaan bibit Ternak Kambing	160 Ekor	3.600.000.000	
			Pengadaan bibit Ternak Kerbau	20 Ekor	800.000.000			Pengadaan bibit Ternak Kerbau	252 Ekor	6.300.000.000	
			Pengadaan bibit Ternak babi	50 Ekor	500.000.000		Kab. Kutai Kartanegara	Pengadaan bibit Ternak babi	50 Ekor	150.000.000	
13.2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah	2 Ton	100.000.000	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah		Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah	2 Ton	155.000.000	Penambahan Anggaran

	Kabupaten/Kota Lain		Kabupaten/Kota Lain			Kabupaten/Kota Lain		Kabupaten/Kota Lain			
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				26.461.000.000	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			1. Panjang Jalan Usaha Tani yang dibangun	12500 Meter	10.900.000.000			1. Panjang Jalan Usaha Tani yang dibangun	12500 Meter	33.900.000.000	
			2. Jumlah Embung Yang di Bangun	21 Unit	15.561.000.000			2. Jumlah Embung Yang di Bangun	21 Unit	27.150.000.000	
14	Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan	1 Dokumen	1.000.000.000	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan	1 Dokumen	1.000.000.000	
14.1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 Dokumen	800.000.000	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 Dokumen	800.000.000	

14.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	18 Laporan	200.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	200.000.000	
15	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	97 Unit	25.461.000.000	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	97 Unit	76.861.000.000	
15.1	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	10.000 Unit	6.900.000.000	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	29 Unit	27.500.000.000	
15.2	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	21 Unit	4.611.000.000	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	21 Unit	6.611.000.000	Menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia harga per unit 545.000.000/ unit
15.3	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Kutai Kartanegara	Jalan Usaha Tani yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	12.500 Unit	10.900.000.000	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Kutai Kartanegara	Jalan Usaha Tani yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	12.500 Unit	33.900.000.000	
15.4	Pembangunan Rehabilitasi dan	Kab. Kutai	Jumlah DAM Parit yang Dibangun	4 Unit	900.000.000	Pembangunan Rehabilitasi dan	Kab. Kutai	Jumlah DAM Parit yang Dibangun	4 Unit	2.900.000.000	Menyesuaikan

	Pemeliharaan DAM Parit	Kartanegara	Direhabilitasi dan Dipelihara			Pemeliharaan DAM Parit	Kartanegara	Direhabilitasi dan Dipelihara			dengan anggaran yang tersedia harga per unit 200.000.000/ unit
15.5	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pintu Air yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	19 Unit	800.000.000	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pintu Air yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	19 Unit	2.800.000.000	Menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia harga per unit 40.000.000/unit
15.6	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	200.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	200.000.000	
15.7	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun	2 Unit	400.000.000	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun	2 Unit	400.000.000	Menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia

	sarana pendukungnya		Direhabilitasi dan Dipelihara			sarana pendukungnya		Direhabilitasi dan Dipelihara			harga per unit 75.000.000/unit
15.8	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara		750.000.000	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara		2.550.000.000	Menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia harga kandang dan ternak per unit 175.000.000/unit
			Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan kandang	30 Unit	200.000.000			Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan kandang	30 Unit	200.000.000	
			Jumlah dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kalang	30 Unit	100.000.000			Jumlah dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kalang	30 Unit	100.000.000	
			Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan	25.000 Meter	200.000.000			Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan	25.000 Meter	200.000.000	

			Pemeliharaan pagar pembatas					Pemeliharaan pagar pembatas			
			Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan gang way	23 Unit	50.000.000			Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan gang way	23 Unit	50.000.000	
			Luas cetak sawah baru dan optimasi lahan Rawa	11 Ha	200.000.000			Luas cetak sawah baru dan optimasi lahan Rawa	11 Ha	200.000.000	
IV	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				975.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				975.000.000	
			1. Persentase Derajat Kesehatan Ternak (jumlah kasus penyakit dibagi populasi)	96 Persen	250.000.000			1. Persentase Derajat Kesehatan Ternak (jumlah kasus penyakit dibagi populasi)	96 Persen	250.000.000	
			2. Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan (Ternak yang akan dipotong daging telur susu	5 Jumlah/ Jenis Produk Hewan	725.000.000			2. Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan (Ternak yang akan dipotong daging telur susu	5 Jumlah/ Jenis Produk Hewan	725.000.000	
16	Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus	100 Persen	250.000.000	Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan	Kab. Kutai	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus	100 Persen	250.000.000	

	Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		penyakit hewan menular			Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kartanegara	penyakit hewan menular			
16.1	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	65 Laporan	100.000.000	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	65 Laporan	100.000.000	
16.2	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	150 Laporan	50.000.000	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	150 Laporan	50.000.000	
16.3	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	2 Laporan	100.000.000	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular		Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	2 Laporan	100.000.000	Laporan menjadi include 1 Laporan
17	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran		Jumlah Pengawasan	2 Jenis	200.000.000	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan	Kab. Kutai	Jumlah Pengawasan	2 Jenis	200.000.000	

	Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota					dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Kartanegara				
17.1	Analisis Risiko Penyakit Hewan zoonosis produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	3 Laporan	100.000.000	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	3 Laporan	100.000.000	
17.2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran HewanProduk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk	2 Laporan	100.000.000	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)		Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	2 Laporan	100.000.000	
18	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	2 Jenis	300.000.000	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	2 Jenis	300.000.000	

18.1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	2 Laporan	100.000.000	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	2 Laporan	100.000.000	
18.2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2 Laporan	200.000.000	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2 Laporan	200.000.000	
19	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah Penerapan dan Pengawasan Teknis Kesmavet	3 Jenis	225.000.000	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Teknis Kesmavet	3 Jenis	225.000.000	
19.1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	7 laporan	75.000.000	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	7 laporan	75.000.000	
19.2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	30 Laporan	75.000.000	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	30 Laporan	75.000.000	
19.3	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	70 Dokumen	75.000.000	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	70 Dokumen	75.000.000	
V	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANG		CAKUPAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN	95 Persen	3.050.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN		CAKUPAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN	95 Persen	1.400.000.000	

	AN BENCANA PERTANIAN		BENCANA PERTANIAN			BENCANA PERTANIAN		BENCANA PERTANIAN			
20	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Luas Pengendalian OPT Pertanian	2400 Ha	3.050.000.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Luas Pengendalian OPT Pertanian	24 Ha	3.050.000.000	
20.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	2.000 Ha	1.100.000.000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	2.000 Ha	1.100.000.000	
20.2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani	200 ha	500.000.000	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani	200 ha	800.000.000	
20.3	Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Luasan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	18 Ha	300.000.000	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Luasan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	18 Ha	-	Tidak sesuai dengan kelompok sasaran (hutan dan

											perkebunan)
20.4	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat *Zoonosis*	95 Laporan	150.000.000	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat *Zoonosis*	95 Laporan	150.000.000	
20.5	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan	200 Laporan	1.000.000.000	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan		Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan	200 Laporan	1.000.000.000	
VI	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	35 Rekomendasi	400.000.000	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	35 Rekomendasi	400.000.000	
21	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Fasilitasi Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 Surat	250.000.000	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Fasilitasi Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50 Surat	700.000.000	
21.1	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	20 Laporan	250.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	50 Surat	700.000.000	Menyesuaikan Anggaran yang tersedia

22	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan Rumah Potong Hewan		Jumlah Penerbitan Izin Usaha ternak	15 Dokumen	150.000.000	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan Rumah Potong Hewan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penerbitan Izin Usaha ternak	45 Surat	450.000.000	
22.1	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan Rumah Potong Hewan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan Rumah Potong Hewan	15 Dokumen	150.000.000	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan Rumah Potong Hewan		Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan Rumah Potong Hewan	45 Surat	450.000.000	Menyesuaikan Anggaran yang tersedia
VII	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Cakupan kelompok tani naik kelas	4 Persen	7.800.000.000	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Cakupan kelompok tani naik kelas	4 Persen	22.550.000.000	
23	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Cakupan Lembaga Petani yang dibina	95 Persen	7.800.000.000	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab. Kutai Kartanegara	Cakupan Lembaga Petani yang dibina	95 Persen	19.675.000.000	

23.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		3.000.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		4.500.000.000	Pemenuhan IKU
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan di kecamatan dan Desa/kelurahan (BPP Posluhtan Taman Teknologi Pertanian dan Peternakan) Penyuluhan	73 Kelembagaan Penyuluhan				Jumlah Kelembagaan Penyuluhan di kecamatan dan Desa/kelurahan (BPP Posluhtan Taman Teknologi Pertanian dan Peternakan) Penyuluhan	73 Kelembagaan Penyuluhan		
			Pertanian Desa/Kelurahan Kecamatan dan Kabupaten	19 BPP				Pertanian Desa/Kelurahan Kecamatan dan Kabupaten	19 BPP		
			Rapat Teknis BPP	19 BPP				Rapat Teknis BPP	19 BPP		
			Pelatihan Dasar Penyuluh ASN dan Swadaya	100 Orang				Pelatihan Dasar Penyuluh ASN dan Swadaya	100 Orang		
			Pelatihan Teknis Bagi Penyuluh	100 Orang				Pelatihan Teknis Bagi Penyuluh	100 Orang		
			Pembinaan dan Supervisi Penyuluh Pertanian	19 BPP				Pembinaan dan Supervisi Penyuluh Pertanian	19 BPP		

			Pengembangan dan Penumbuhan Pos Penyuluhan Desa/kelurahan	80 Posluhdes				Pengembangan dan Penumbuhan Pos Penyuluhan Desa/kelurahan	80 Posluhdes		
			Pengembangan dan penumbuhan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S)	6 P4S				Pengembangan dan penumbuhan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S)	6 P4S		
			Pelaksanaan Diseminasi Teknologi di Taman Teknologi Pertanian Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang	1 TTP			Kab. Kutai Kartanegara	Pelaksanaan Diseminasi Teknologi di Taman Teknologi Pertanian Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang	1 TTP		
23.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		2.200.000.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		6.275.000.000	Pemenuhan IKU
			Jumlah Kelembagaan Petani yg mendapatkan pelatihan/Pembinaan/ pendampingan/penumbuhan	2743 Kelembagaan Petani				Jumlah Kelembagaan Petani yg mendapatkan pelatihan/Pembinaan/ pendampingan/penumbuhan	2743 Kelembagaan Petani		

			Pembinaan dan Penumbuhan Kelompok Tani	2.550 Kelompok Tani Dewasa				Pembinaan dan Penumbuhan Kelompok Tani	2.550 Kelompok Tani Dewasa		
			Pembinaan dn Penumbuhan Kelompok Wanta Tani	195 Kelompok Wanita Tani				Pembinaan dn Penumbuhan Kelompok Wanta Tani	195 Kelompok Wanita Tani		
			Pembinaan dan penumbuhan Kelompok Taruna Tani (Petani Milenial)	40 Kelompok Taruna Tani				Pembinaan dan penumbuhan Kelompok Taruna Tani (Petani Milenial)	40 Kelompok Taruna Tani		
			Fasilitasi dan Pendampingan Kelompok KTNA (Menghadiri Rembug Peda dan Penas)	1 KTNA				Fasilitasi dan Pendampingan Kelompok KTNA (Menghadiri Rembug Peda dan Penas)	1 KTNA		
			Pembinaan dan penumbuhan Asosiasi Petani	2 Asosiasi Petani				Pembinaan dan penumbuhan Asosiasi Petani	2 Asosiasi Petani		
			Pembinaan dan Penumbuhan Gapoktan	170 Gapoktan				Pembinaan dan Penumbuhan Gapoktan	170 Gapoktan		
			Lomba Asah Terampil Petani	195 Kelompok Tani				Lomba Asah Terampil Petani	195 Kelompok Tani		
			Kontes Produk Pertanian	40 Kelompok Tani			Kab. Kutai	Kontes Produk Pertanian	40 Kelompok Tani		

							Kartanegara				
23.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	3.800.000.000	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan yang mendapatkan sarana/prasarana Penyuluhan Pertanian	5 Kelembagaan Penyuluhan	2.000.000.000			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan yang mendapatkan sarana/prasarana Penyuluhan Pertanian	5 Kelembagaan Penyuluhan		
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian di BPP	19 BPP				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian di BPP	19 BPP		
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian di Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan	80 Posluhdes				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian di Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan	80 Posluhdes		
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan	6 P4S				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan	6 P4S		

			Prasarana Penyuluhan Pertanian di Pusat pelatihan Perdesaan Swadaya (P4S)					Prasarana Penyuluhan Pertanian di Pusat pelatihan Perdesaan Swadaya (P4S)			
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian di Tama Teknologi Pertanian (TTP) Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang	1 TTP				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian di Tama Teknologi Pertanian (TTP) Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang	1 TTP		
			Pembangunan Pondok Pertemuan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan	5 Posluhdes			Kab. Kutai Kartanegara	Pembangunan Pondok Pertemuan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan	5 Posluhdes		
23.4	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk			Pembentukan Badan Usaha Milik Petani		Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Unit		
			Jumlah Penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani					Jumlah Penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani	Kelembagaan Ekonomi Petani		
			Pembinaan dan Pendampingan Kios Saprodi	179 Kios Saprodi	300.000.000			Pembinaan dan Pendampingan Kios Saprodi	179 Kios Saprodi	1.100.000.000	Pemenuhan IKU

			Pengembangan dan Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA)	126 LKMA				Pengembangan dan Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA)	126 LKMA		
			Pengembangan dan penumbuhan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)	37 UPJA			Kab. Kutai Kartanegara	Pengembangan dan penumbuhan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)	37 UPJA		
23.5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	16 Unit	300.000.000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	16 Unit	4.000.000.000	
	Jumlah anggaran				119.048.181.827	Jumlah anggaran analisa kebutuhan				252.536.346.064	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Pertanian dan Peternakan dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Proses penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 didasarkan kepada Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranhir RKPD) Tahun 2025, agar didalam pencapaian sasara dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra dapat disinkronkan. Program dan kegiatan yang disusun untuk Tahun 2024 disamping hasil survey ke lapangan, juga menerima masukan dan usulan dari kelompok masyarakat berupa proposal melalui Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Adapun Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 dibawah ini :

Tabel TC. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaranan	Pagu	Catatan
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Liang Amanah desa liang kecamatan kota bangun , Kab. Kutai Kartanegara	Tersedianya Pembangunan Kandangn Kambing	1 Unit	150.000.000,00	POKIR
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Bantuan Mesin Alsintan Rotavator Jl. Awanglong RT 19 Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara	Pengadaan Alsintan Rotavator	1 Paket	325.000.000,00	POKIR
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kelompok Ternak Mekar Jaya Di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara	Pengadaan Bibit Ternak Kambing	25 Ekor	150.000.000,00	POKIR
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kelompok Ternak Ayyas Desa Muara Kaman Ilir Alamat : Sekretariat, Jalan Muso Bin Salim, RT 06 Dusun Sinar Muda, Muara Kaman Ilir, Kab. Kutai Kartanegara	Pengadaan Bibit Ternak Kambing	25 Ekor	150.000.000,00	POKIR
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara	Pengadaan Bibit Ternak Sapi	12 Ekor	170.000.000,00	POKIR
7	Program Penyediaan dan Pengembangan	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah	Jalan Poros Samarida-Anggana RT. 23 No. 21 Desa	Pengadaan Bibit Ternak Sapi	12 Ekor	170.000.000,00	POKIR

	Prasarana Pertanian		Kabupaten/Kota Lain	Sungai Mariam Kecamatan Anggana, Kab. Kutai Kartanegara				
8	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Family bersatu desa kota bangun ilir , Kab. Kutai Kartanegara	Pengadaan Bibit Ternak Kambing	25 Ekor	150.000.000,00	POKIR
9	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Liang amanah Desa liang kecamatan kota bangun , Kab. Kutai Kartanegara	Pengadaan Bibit Ternak Kambing	25 Ekor	150.000.000,00	POKIR

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaranan	Pagu	Catatan
10	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Loa Tebu Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Tersedianya Bibit Ternak Ayam Petelur	1000 Ekor	20.000.000,00	POKIR
11	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kelompok Tani Pemuda Mandiri Perdana Desa Perdana Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Pengadaan Bibit Ternak Sapi	12 Ekor	170.000.000,00	POKIR
12	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tenggarong Seberang	Pengadaan Bibit Ternak Sapi	12 Ekor	170.000.000,00	POKIR
13	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan Pondok Pertemuan Gapoktan, Sei Pimping RT.17 Desa Loa Duri Ulu, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu	Perlu adanya Pembangunan Pondok Pertemuan Gapoktan	1 Paket	150.000.000,00	MUSRENBANG
14	Program Penyediaan dan Pengembangan	Pembangunan Prasarana	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Irigasi	Pembuatan Parit Pertanian RT.10 dan RT.17, Desa Loa	Normalisasi Drainase Irigasi	1 Paket	1.000.000.000,00	MUSRENBANG

	Prasarana Pertanian	Pertanian	Pertanian	Duri Ulu, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu	Pertanian			
15	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Loleng (Jalan Pinang Kadep), Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Loleng	Pembuatan / Peningkatan Jalan Usaha Tani	1 Paket	700.000.000,00	MUSRENBANG
16	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	RT 002 Desa Loleng, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Loleng	Pembangunan / Peningkatan Jembatan Ulin Jalan Usaha Tani	1 Paket	800.000.000,00	MUSRENBANG
17	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dusun Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Sidomukti	Pembuatan / Peningkatan Jalan Usaha Tani	14 Segment	4.000.000.000,00	MUSRENBANG
18	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	RT. 04 Desa Bangun Rejo , Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Bangun Rejo	Pembuatan / Peningkatan Jalan Usaha Tani	1 Paket	2.000.000.000,00	MUSRENBANG

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaranan	Pagu	Catatan
19	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	RT.01, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Buana Jaya	Pembuatan / Peningkatan Jalan Usaha Tani	1 Paket	200.000.000,00	MUSRENBANG
20	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	RT. 01 Desa Bangun Rejo , Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Bangun Rejo	Pembuatan / Peningkatan Jalan Usaha Tani	1 Paket	300.000.000,00	MUSRENBANG
21	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Kulon Desa Kota Bangun II, Kab. Kutai	Pembuatan / Peningkatan Jalan Usaha Tani	1 Paket	400.000.000,00	MUSRENBANG

				Kartanegara, Kota Bangun Darat, Kota Bangun II				
22	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Kedang Jadi Desa Kota Bangun II, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Kota Bangun II	Pembuatan / Peningkatan Jalan Usaha Tani	1 Paket	500.000.000,00	MUSRENBANG
23	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Peningklatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Lembong, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Kota Bangun II	Pembuatan / Peningkatan Jalan Usaha Tani	1 Paket	500.000.000,00	MUSRENBANG
24	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Sedulang RT.001, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Sedulang	Pembuatan / Peningkatan Jalan Usaha Tani	1 Paket	500.000.000,00	MUSRENBANG
25	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kelompok Tani Sangkuriang Sakti A, Dusun Sidomakmur RT 21, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Buana Jaya	Pembuatan / Peningkatan Jalan Usaha Tani	1 Paket	200.000.000,00	MUSRENBANG
26	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	RT 010 Desa Jembayan Tengah, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jembayan Tengah	Pembangunan / Peningkatan Jembatan Ulin Jalan Usaha Tani	1 Paket	250.000.000,00	MUSRENBANG

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaranan	Pagu	Catatan
27	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	RT 006 Tudungan Desa Jembayan Tengah, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jembayan Tengah	Pembuatan / Peningkatan Jalan Usaha Tani	1 Paket	250.000.000,00	MUSRENBANG
28	Program Penyediaan	Pembangunan	Pembangunan, Rehabilitasi	RT 010 Tudungan Desa	Pembuatan /	1 Paket	150.000.000,00	MUSRENBANG

	dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prasarana Pertanian	dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jembayan Tengah, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jembayan Tengah	Peningkatan Jalan Usaha Tani			
29	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Sidomulyo	Pembuatan / Peningkatan Jalan Usaha Tani	1 Paket	250.000.000,00	MUSRENBANG
30	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	DUSUN MEKAR JAYA. RT 11 Karang Tunggal. Tenggarong Seberang. Kab. Kutai Kartanegara. Kalimantan Timur, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Karang Tunggal	Pembuatan / Peningkatan Jalan Usaha Tani	1 Paket	2.000.000.000,00	MUSRENBANG
31	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Gapoktan Mekar Jaya Rt 04 Kel.Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	pengadaan handtractor untuk pertanian	2 Unit	90.000.000,00	MUSRENBANG
32	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Gapoktan Mekar jaya Kel.Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	pengadaan mesin Rumput untuk pertanian	2 Unit	15.000.000,00	MUSRENBANG
33	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Alsintan Handtracktor untuk Kelompok tani Desa Kota Bangun II, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Kota Bangun II	Alsintan atau alat dan mesin pertanian adalah sebutan yang digunakan untuk menyebut alat-alat atau mesin yang digunakan dalam bidang	1 Unit	45.000.000,00	MUSRENBANG

					pertanian.			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaranan	Pagu	Catatan
34	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Alsintan Mesin Perontok Padi Untuk Kelompok Tani Desa Kota Bangun II, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Kota Bangun II	Alsintan atau alat dan mesin pertanian adalah sebutan yang digunakan untuk menyebut alat-alat atau mesin yang digunakan dalam bidang pertanian.	1 Unit	40.000.000,00	MUSRENBANG
35	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	jl pramuka rt 03, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argosari	Belum adanya Pengadaan traktor mini dan bibit kelengkeng (poktan Handayani)	1 Paket	100.000.000,00	MUSRENBANG
36	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Desa Sukabumi, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Suka Bumi	Kurangya Alat Pertanian (Mesin Perontok Padi)	1 Unit	40.000.000,00	MUSRENBANG
37	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	RT 004 Dusun Harapan Jaya, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Tani Harapan	Pengadaan Alsitan untuk Gapoktan (Kelengkapan Sarana Petani masih minim)	1 Unit	350.000.000,00	MUSRENBANG
38	Program Penyediaan dan Pengembangan	Penyediaan Benih/Bibit Ternak	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari	DESA KOTA BANGUN I, Kab. Kutai Kartanegara,	Ayam petelur	1000 ekor	200.000.000	MUSRENBANG

	Sarana Pertanian	dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kota Bangun Darat, Kota Bangun I				

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaranan	Pagu	Catatan
39	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	RT 03, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Rantau Hempang	Ayam Potong	1000 ekor	200.000.000	MUSRENBANG
40	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jalan Bayaq Ding RT.03 Desa Budaya Lekaq Kidau Kec.Sebulu Kab.Kukar, Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Lekaq Kidau	Pengadaan bibit Ternak Babi	50 ekor	150.000.000	MUSRENBANG
41	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jl. Durian RT.14 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Pengadaan bibit Ternak Kambing	25 ekor	150.000.000	MUSRENBANG
42	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	RT.12. Lokasi Kambingan Desa Giri Agung, Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Giri	Pengadaan bibit Ternak Kambing	25 ekor	150.000.000	MUSRENBANG

		Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Agung				

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaranan	Pagu	Catatan
43	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Desa Sanggulan Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sanggulan	Pengadaan bibit Ternak Kambing	25 ekor	150.000.000	MUSRENBANG
44	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Sbeemban RT. 04, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Sebemban	Pengadaan bibit Ternak Kambing	25 ekor	150.000.000	MUSRENBANG
45	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Sebemban RT. 05, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Sebemban	Pengadaan bibit Ternak Kambing	25 ekor	150.000.000	MUSRENBANG
46	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Desa Teluk Bingkai Kec. Kenohan, Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Teluk Bingkai	Pengadaan bibit Ternak Kambing	25 ekor	150.000.000	MUSRENBANG
47	Program Penyediaan dan Pengembangan	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya	jalan KH. Dewantara RT 007 Desa Sebulu Ilir	Pengadaan bibit Ternak Kambing	25 ekor	150.000.000	MUSRENBANG

	Sarana Pertanian	Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir				

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaranan	Pagu	Catatan
48	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Desa Mulawarman (Permohonan Bantuan Ternak Kambing), Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Mulawarman	Pengadaan bibit Ternak Kambing	25 ekor	150.000.000	MUSRENBANG
49	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Desa Sukabumi, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Suka Bumi	Pengadaan bibit Ternak Kambing	25 ekor	150.000.000	MUSRENBANG
50	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Desa Kota Bangun II, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Kota Bangun II	Pengadaan bibit Ternak Kambing	25 ekor	150.000.000	MUSRENBANG
51	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota	jl. Etam RT. 20, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Jahab	Pengadaan bibit Ternak Kambing	25 ekor	150.000.000	MUSRENBANG

		Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Lain					
52	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Salo Palai Rt 03, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Salo Palai	Pengadaan bibit Ternak Kambing	25 ekor	150.000.000	MUSRENBANG

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaranan	Pagu	Catatan
53	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	desa loa duri ulu, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu	Pengadaan bibit Ternak Kambing	25 ekor	150.000.000	MUSRENBANG
54	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Desa Prangat Baru, Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Prangat Baru	Pengadaan bibit Ternak Kambing	25 ekor	150.000.000	MUSRENBANG
55	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Desa loa duri ilir, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir	Pengadaan bibit Ternak Kambing	25 ekor	150.000.000	MUSRENBANG

		Kabupaten/Kota Lain						
56	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Desa Muara Leka, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Leka	Pengadaan bibit Ternak Kambing	25 ekor	150.000.000	MUSRENBANG
57	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jl. gerbang dayaku, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Rampak Lambur	Pengadaan bibit Ternak Kambing	25 ekor	150.000.000	MUSRENBANG
58	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Desa Enggelam Kecamatan Muara Wis, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Enggelam	Pengadaan bibit Ternak Kambing	25 ekor	150.000.000	MUSRENBANG
No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaranan	Pagu	Catatan
59	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jl. Dewi Sartika RT.05, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Kayu Batu	Pengadaan bibit Ternak Kambing	25 ekor	150.000.000	MUSRENBANG
60	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jl. Bukit Sion RT.01, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Jahab	Pengadaan bibit Ternak Kerbau	12 ekor	300.000.000	MUSRENBANG

		Kabupaten/Kota Lain						
61	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	RT 11 Desa Kota Bangun III, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Kota Bangun III	Pengadaan bibit Ternak Kerbau	12 ekor	300.000.000	MUSRENBANG
62	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Sebemban RT. 05, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Sebemban	Pengadaan bibit Ternak Kerbau	12 ekor	300.000.000	MUSRENBANG
63	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jl. Gunug Triyu Rt. 05, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Jahab	Pengadaan bibit Ternak Kerbau	12 ekor	300.000.000	MUSRENBANG
64	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Desa Liang Buaya, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Liang Buaya	Pengadaan bibit Ternak Kerbau	12 ekor	300.000.000	MUSRENBANG
No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaranan	Pagu	Catatan
65	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Desa Tanjung Batu, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Tanjung Batu	Pengadaan bibit Ternak Kerbau	12 ekor	300.000.000	MUSRENBANG

		Kabupaten/Kota Lain						
66	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Desa Tanjung Batu, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Tanjung Batu	Pengadaan bibit Ternak Kerbau	12 ekor	300.000.000	MUSRENBANG
67	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Loa Sakoh, Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Loa Sakoh	Pengadaan bibit Ternak Kerbau	12 ekor	300.000.000	MUSRENBANG
68	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	RT 008 , Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Pengadaan bibit Ternak Kerbau	12 ekor	300.000.000	MUSRENBANG
69	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Desa Sukabumi, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Suka Bumi	Pengadaan bibit Ternak Kerbau	12 ekor	300.000.000	MUSRENBANG
70	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Desa Kota Bangun II, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Kota Bangun II	Pengadaan bibit Ternak Kerbau	12 ekor	300.000.000	MUSRENBANG

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaranan	Pagu	Catatan
71	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Ternak sapi Kelompok Tani Suka Maju dan Subur, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Kota Bangun II	Pengadaan bibit Ternak Kerbau	12 ekor	300.000.000	MUSRENBANG
72	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jalan KH. Dewantara rt 007 Desa Sebulu ilir Kecamatan Sebulu , Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	Pengadaan bibit Ternak Kerbau	12 ekor	300.000.000	MUSRENBANG
73	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	RT 014, RT 015 Dusun Hilir dan RT 021, RT 022 Dusun Behuma, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga	Pengadaan bibit Ternak Kerbau	12 ekor	300.000.000	MUSRENBANG
74	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jl. Dr. Nazir RT.03, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Kayu Batu	Pengadaan bibit Ternak Kerbau	12 ekor	300.000.000	MUSRENBANG
75	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	RT 006, Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Teluk Muda	Pengadaan bibit Ternak Kerbau	12 ekor	300.000.000	MUSRENBANG

76	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Desa Muara Leka, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Leka	Pengadaan bibit Ternak Kerbau	12 ekor	300.000.000	MUSRENBANG
No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaranan	Pagu	Catatan
77	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	DESA KAHALA, Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala	Pengadaan bibit Ternak Kerbau	12 ekor	300.000.000	MUSRENBANG
78	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	JL. Mulawarman RT.003 Desa Lebak Cilong, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Lebak Cilong	Pengadaan bibit Ternak Kerbau	12 ekor	300.000.000	MUSRENBANG
79	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Desa Sedulang, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Sedulang	Pengadaan bibit Ternak Kerbau	12 ekor	300.000.000	MUSRENBANG
80	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	RT 02 , Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Pengadaan bibit Ternak Kerbau	12 ekor	300.000.000	MUSRENBANG

81	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	kelompok ternak lembuswana RT 05 kel.wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Pengadaan bibit Ternak Sapi	12 ekor	200.000.000	MUSRENBANG
82	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Desa Perdana RT. 1, Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Perdana	Pengadaan bibit Ternak Sapi	12 ekor	200.000.000	MUSRENBANG

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaranan	Pagu	Catatan
83	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Desa Loa Janan Ulu, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Janan Ulu	Studi Tiru Bidang Pertanian / Green House	2 Kali	75.000.000,00	MUSRENBANG
84	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Jl. Anggana Rt.15 Kel. panji, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Pelatihan Kelompok Tani (Poktan)		150.000.000,00	MUSRENBANG
85	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Jl. Anggana Rt.18 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Pelatihan Kelompok Tani (Poktan)		150.000.000,00	MUSRENBANG
86	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Jl.Anggana Rt.18 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Pelatihan Kelompok Tani (Poktan)		150.000.000,00	MUSRENBANG
87	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan sekolah	RT 11 Desa Kota Bangun III , Kab. Kutai Kartanegara, Kota	Pelatihan Kelompok Tani		150.000.000,00	MUSRENBANG

			lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Bangun Darat, Kota Bangun III	(Poktan)			
88	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Sebemban, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Sebemban	Pelatihan Kelompok Tani (Poktan)		150.000.000,00	MUSRENBANG
89	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Desa Wonosari, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Wono Sari	Pelatihan Kelompok Tani (Poktan)		150.000.000,00	MUSRENBANG

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaranan	Pagu	Catatan
90	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Dusun Sido Makmur RT 19, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Buana Jaya	Pelatihan Kelompok Tani (Poktan)		150.000.000,00	MUSRENBANG
91	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Jalan gunung dadeh rt 010 Desa Sebulu Ilir Kecamatan Sebulu , Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	Pelatihan Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		150.000.000,00	MUSRENBANG
92	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Honor Kelompok Tani Desa Kota Bangun II, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Kota Bangun II	Pelatihan Kelompok Tani (Poktan)		150.000.000,00	MUSRENBANG
93	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	jln. Reformasi III Desa Benua Puhun, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Benua Puhun	Pelatihan Kelompok Tani (Poktan)		150.000.000,00	MUSRENBANG
94	Program Penyuluhan	Pelaksanaan	Pembentukan dan	Desa Kota Bangun I, Kab.	Pelatihan		150.000.000,00	MUSRENBANG

	Pertanian	Penyuluhan Pertanian	Penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Kota Bangun I	Kelompok Tani (Poktan)			
95	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Desa Umaq Tukung, Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Umaq Tukung	Pelatihan Kelompok Tani (Poktan)		150.000.000,00	MUSRENBANG
96	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Desa Umaq Tukung, Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Umaq Tukung	Pelatihan Kelompok Tani (Poktan)		150.000.000,00	MUSRENBANG

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaranan	Pagu	Catatan
97	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Sidomulyo	Pelatihan Kelompok Tani (Poktan)		150.000.000,00	MUSRENBANG
98	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Sidomulyo	Pelatihan Kelompok Tani (Poktan)		150.000.000,00	MUSRENBANG
99	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Jl. Dr. Nazir RT.03, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Kayu Batu	Pelatihan Kelompok Tani (Poktan)		150.000.000,00	MUSRENBANG
100	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan sekolah lapang	Kecamatan Muara Muntai, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara	Pelatihan Kelompok Tani (Poktan)		150.000.000,00	MUSRENBANG

			kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Muntai Ilir				
	Jumlah						29.330.000.000,00	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020–2024 menegaskan Tujuan, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan;
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian;
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Dengan Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri;
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional;
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional;
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian;
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan;
6. Terkendalinya penyebaran Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan;
7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional;
8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat menjadi acuan perancangan dan pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan peternakan secara nasional, menjangkau kemitraan lintas bidang, lintas sektor, lintas program, lintas pelaku dan lintas Kementerian/Lembaga dalam membuka ruang solusi yang lebih lapang seiring dengan semakin luasnya tentang potensi, kelemahan, peluang, tantangan dan permasalahan yang melingkupi penyelenggaraan pertanian dan peternakan saat ini dan kedepan termasuk dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berimplikasi terhadapsub sektor pertanian dan peternakan.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni "*Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".*

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pembangunan pertanian pada periode jangka menengah tahun 2020-2024, maka Kementerian Pertanian menetapkan tujuan pembangunan pertanian tahun 2020-2024 yang akan dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pertanian melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan, pembangunan/ pemeliharaan sumber benih, penanganan pascapanen, pembinaan usaha dan perlindungan pertanian.
2. Memberikan pelayanan berkualitas di bidang perencanaan, administrasi keuangan, aset, umum, organisasi, tata laksana, kepegawaian, humas, hukum, administrasi perkantoran, evaluasi pelaksanaan kegiatan serta penyediaan data dan informasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk pencapaian Misi (3) Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka ditetapkanlah tujuan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Tujuan tersebut di ukur dengan indikator tujuan Pertumbuhan Ekonomi sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian, dengan indikator sasaran produktivitas Padi dan Jagung;
2. Meningkatnya produksi komoditas pertanian, dengan indikator sasaran produksi Padi, Jagung, Palawija dan Hortikultura;
3. Meningkatnya Produksi Peternakan, dengan indikator sasaran produksi daging dan telur; serta

4. Meningkatnya Kesejateraan Petani, dengan indikator sasaran Nilai Tukar Petani (NTP).

Tujuan dapat dirumuskan sebagai gambaran tentang keadaan yang diinginkan atau dicita-citakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan selama kurun waktu satu tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan sebuah upaya dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara seperti yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025. Tujuan Renja ini ditetapkan untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada masa mendatang.

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pertanian dan Peternakan setiap tahunnya sesuai dengan penjabaran dari tujuan Renja. Dari tujuan Renja Dinas Pertanian dan Peternakan, dapat dirumuskan turunan tujuan berupa sasaran-sasaran perencanaan pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang efektif dan efisien serta memiliki indikator yang spesifik, jelas, dan terukur sebagai bahan evaluasi, monitoring, dan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2025 sebagai pendukung pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 : Tujuan dan Sasaran Yang Ingin Dicapai Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan Dan Sasaran		Satuan	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2025
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan			Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman pangan dan hortikultura		Persen	2,22
				Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan		Persen	0,33
		1.	Meningkatnya Produksi Tanaman	1	Produksi padi	Ton	116.125
				2	Produksi Jagung	Ton	10.750

			Pangan dan Hortikultura	3	Hortikultura	Ton	112.008
		2.	Meningkatnya Produksi Peternakan	1	Daging	Kg	21.750.000
				2	Telur	Kg	3.980.900
		3.	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan	1	Produksi padi	Ton/Ha	4,16
				2	Produksi Jagung	Ton/Ha	5,40
		4.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	NTP Tanaman pangan		Persen	106.44

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Program Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN yang ditujukan untuk menjamin kelangsungan proses transformasi ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan menetapkan kawasan-kawasan strategis pertanian (dalam arti luas) secara terintegrasi, mulai dari kepastian ketersediaan lahan, pengairan, penyiapan petani unggul hingga sarana dan prasarana dan infratsruktur wilayah.

Indikator output yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN Pembangunan Petanian Berbasisis Kawasan adalah :

a. Terwujudnya penetapan kawasan sentra pertanian.
b. Bertambahnya jumlah embung yang dibangun.
c. Bertambahnya jumlah check dam (dam parit) yang dibangun.
d. Bertambahnya panjang jalan pertanian yang dibangun.
e. Bertambahnya areal tanam jagung.
f. Bertambahnya jaringan irigasi tersier yang dibangun.
g. Bertambahnya pintu air tersier yang dibangun.

Sedangkan indikator outcome yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN Pembangunan Petanian Berbasisis Kawasan adalah :

a. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian (padi dan jagung);
b. Meningkatnya kesejahteraan petani yang dikur dari nilai tukar petani

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra), Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik dinas sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat. Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2025 direncanakan berjumlah 7 Program, 23 Kegiatan dan 83 Sub Kegiatan

dengan total pagu anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 226.199.330.224,- sesuai dengan yang tercantum dalam Aplikasi SIPD-RI. Kemendagri.go.id Tahun 2025.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2025, secara rinci dapat dilihat pada Lampiran Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan maju Tahun 2026 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel rencana program dan kegiatan sebagaimana format tabel berikut :

Tabel TC.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Peternakan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66 Nilai	76.199.351.274		68 Nilai	66.322.181.827
3.27.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*13 Dokumen*	*1.000.000.000*		*13 Dokumen*	*685.000.000*
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	500.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	350.000.000
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	300.000.000
3.27.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara		-
3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	250.000.000	Kab. Kutai Kartanegara		-
3.27.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara		-

	Perencanaan Perangkat Daerah						
3.27.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel*	*17 Laporan*	*62.238.689.502*		*17 Laporan*	*56.104.043.000*
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	481 Orang/bulan	61.225.252.502	Kab. Kutai Kartanegara	481 Orang	55.335.606.000
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	580.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	34 Orang	360.000.000
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	48.437.000	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	48.437.000
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	360.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	200 Dokumen	360.000.000
3.27.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Kutai Kartanegara		-
3.27.01.2.03	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*115.000.000*		*1 Dokumen*	*56.065.000*
3.27.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	56.065.000

	Daerah SKPD	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					
3.27.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara		-
3.27.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000	Kab. Kutai Kartanegara		-
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
3.27.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Kutai Kartanegara		-
3.27.01.2.04	*Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*			*20.000.000*			-
3.27.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Kutai Kartanegara		-
3.27.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Kutai Kartanegara		-
3.27.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian*	*2 Dokumen*	*789.471.000*		*2 Dokumen*	*1.053.167.000*
3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	481.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	481 Unit	481.000.000
3.27.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	481 Dokumen	51.740.000	Kab. Kutai Kartanegara		481.000.000
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	25 Orang	240.500.000	Kab. Kutai Kartanegara	25 Orang	74.936.000

		Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					
3.27.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	16.231.000	Kab. Kutai Kartanegara	10 Orang	16.231.000
3.27.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*8 Layanan*	*1.264.540.700*		*8 Layanan*	*1.626.122.755*
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	47.076.700	Kab. Kutai Kartanegara	5 Unit	47.076.700

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	350.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	130 Jenis	776.582.055
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	260.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	500 Kotak, 10 Jenis	245.000.000
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	49.475.000	Kab. Kutai Kartanegara	4 Jenis	49.475.000
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2000 Dokumen	24.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	100 Buku	24.000.000
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	468.565.000	DKI Jakarta, Prov. Kalimantan Timur, Kab. Kutai Kartanegara	220 Rapat 400 Orang	418.565.000

3.27.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	650 Dokumen	65.424.000	Kab. Kutai Kartanegara	10 Dokumen	65.424.000
3.27.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah pengadaan barang milik daerah*	*50 Unit*	*3.357.110.480*		*50 Unit*	*492.350.480*
3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	2.036.523.000	Kab. Kutai Kartanegara		-
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	528.237.000	Kab. Kutai Kartanegara		-
3.27.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	300.000.000	Kab. Kutai Kartanegara		-
3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	492.350.480	Kab. Kutai Kartanegara	1 Jenis 200 Meter Persegi	492.350.480
3.27.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*12 Bulan*	*5.742.757.592*		*12 Bulan*	*4.772.757.592*

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.991.000	Kab. Kutai Kartanegara	250 Lembar	1.991.000
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	654.084.564	Kab. Kutai Kartanegara	67 Rekening	654.084.564
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	95.832.000	Kab. Kutai Kartanegara	75 Unit	95.832.000
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	4.990.850.028	Kab. Kutai	226 Bulan	4.020.850.028

	Umum Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Kartanegara		
3.27.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Barang Milik Daerah*	*340 Unit*	*1.671.782.000*		*340 Unit*	*1.532.676.000*
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	278.212.000	Kab. Kutai Kartanegara	2 Unit	139.106.000
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	219 Unit	698.570.000	Kab. Kutai Kartanegara	222 Unit 150 Unit	698.570.000
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	5 Jenis	200.000.000
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	495.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	33 Unit	495.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1) Luas Tanam Padi 2) Luas Tanam Jagung 3) Luas Tanam Palawija	1) 41802.48 Hektar (Ha) 2) 20000 Hektar	69.735.170.000		1) 42576.60 Hektar (Ha) 2) 30000 Hektar	14.240.000.000

		(Porang) 4) Luas Tanam Hortikultura 5) Peningkatan Populasi Ternak Besar 6) Peningkatan Populasi Ternak Kecil 7) Peningkatan Populasi Ternak Unggas	(Ha) 3) 55 Hektar (Ha) 4) 29278.24 Hektar (Ha) 5) 37061.00 Ekor 6) 18440.30 Ekor 7) 17414000.00 Ekor			(Ha) 3) 65 Hektar (Ha) 4) 30200.81 Hektar (Ha) 5) 37988.00 Ekor 6) 18901.31 Ekor 7) 17938000.00 Ekor	
3.27.02.2.01	*Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*	*Jumlah Unit Sarana Pertanian Yang Dimanfaatkan*	*10984 Unit*	*57.841.300.000*		*10984 Unit*	*9.710.000.000*
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	350.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	5 Kawasan	200.000.000
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	694 Laporan	57.491.300.000		100 Hektar (Ha), 3 Hektar (Ha), 3600 Hektar (Ha), 1300 Hektar (Ha), 3066 Unit	9.510.000.000
	Pendampingan penggunaan pupuk (organik dan non organik) dan pembenahan tanah		*7*	*12.500.000.000*	*Loa Kulu, Tenggarong, Sebulu, Kota Bangun, Muara Kaman, Tenggarong Seberang, Marang Kayu,*		
	Pendampingan penggunaan benih unggul bermutu padi sawah		*7*	*1.700.000.000*	*Loa Kulu, Tenggarong, Sebulu, Kota Bangun, Muara Kaman, Tenggarong Seberang, Marang Kayu,*		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	Pendampingan Pengembangan Jagung Pipil di Lahan Kering		*7*	*6.930.000.000*	*Muara Badak, Tenggarong, Sebulu, Kota Bangun, Muara Kaman, Muara Jawa, Muara Wis,*		
	Pendampingan Penggunaan Green House		*6*	*5.977.800.000*	*Loa Kulu, Tenggarong, Sebulu, Muara Kaman, Samboja, Tenggarong Seberang,*		
	Pendampingan Sarana Pendukung Pengembangan Hortikultura		*4*	*1.500.000.000*	*Loa Kulu, Sebulu, Muara Kaman, Tenggarong Seberang,*		
	Penyediaan alsintan berupa Combine Harvester		*20*	*11.600.000.000*	*Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Tenggarong, Sebulu, Kota Bangun, Muara Kaman, Samboja, Tenggarong Seberang, Marang Kayu,*		
	Penyediaan alsintan berupa Handtraktor Glebek		*30*	*1.251.750.000*	*Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Tenggarong, Sebulu, Kota Bangun, Muara Kaman, Samboja, Tenggarong Seberang, Marang Kayu,*		
	Penyediaan alsintan berupa Rotary		*10*	*50.000.000*	*Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Tenggarong, Sebulu, Kota Bangun, Muara Kaman, Samboja, Tenggarong Seberang, Marang Kayu,*		

	Penyediaan alsintan berupa Rotavator		*5*	*1.875.000.000*	*20 Kecamatan*		
	Penyediaan alsintan berupa Cultivator		*30*	*630.000.000*	*Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Tenggarong, Sebulu, Kota Bangun, Muara Kaman, Samboja, Tenggarong Seberang, Marang Kayu,*		
	Penyediaan alsintan berupa Pompa Air		*30*	*2.400.000.000*	*Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Tenggarong, Sebulu, Kota Bangun, Muara Kaman, Samboja, Tenggarong Seberang, Marang Kayu,*		
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	Pneydiaan alsintan berupa Handsprayer		*500*	*500.000.000*	*Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Tenggarong, Sebulu, Kota Bangun, Muara Kaman, Samboja, Tenggarong Seberang, Marang Kayu,*		
	Penyediaan alsintan berupa Traktor Roda		*5*	*1.251.750.000*	*Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Tenggarong, Sebulu, Kota Bangun, Muara Kaman, Samboja, Tenggarong Seberang, Marang Kayu,*		
	Penyediaan alsintan berupa Alat Tanam		*20*	*320.000.000*	*Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Tenggarong, Sebulu, Kota Bangun, Muara Kaman, Samboja, Tenggarong Seberang, Marang Kayu,*		

	Penediaan alsintan berupa exavator mini		*10*	*7.810.000.000*	*Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Tenggarong, Sebulu, Kota Bangun, Muara Kaman, Samboja, Tenggarong Seberang, Marang Kayu,*		
	Penyediaan alsintan (AP)		*1*	*750.000.000*	*20 Kecamatan*		
	PENGADAAN ALSINTAN (POWER TRHESHER)		*1*	*100.000.000*	*Tenggarong Seberang, Bangun Rejo,*		
	Pengadaan Alsintan		*1*	*345.000.000*	*Muara Kaman, Panca Jaya,*		
3.27.02.2.02	*Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan*	*31 Komoditi*	*750.000.000*		*36 Komoditi*	*600.000.000*
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	5 Varietas Unggul Baru (VUB)	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara		-

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	5 Dokumen	250.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	40 Ekor 1400 Ekor 3 Jenis	200.000.000
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	5 Dokumen	300.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	2 Kali 2 Laporan	200.000.000
3.27.02.2.05	*Pengendalian dan*	*Cakupan Pengendalian dan*	*2 Data*	*220.000.000*		*2 Data*	*275.000.000*

	Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Pengawasan*	*Pengawasan*			*Pengawasan*	
3.27.02.2.05.0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	50 Laporan	55.000.000	Kab. Kutai Kartanegara		-
3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	20 Laporan	55.000.000	Kab. Kutai Kartanegara		-
3.27.02.2.05.02	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	2 Dokumen	55.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	100 Sampel	55.000.000
3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	2 Laporan	55.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	15 Kali	55.000.000
3.27.02.2.06	*Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain*	*1) Tersedianya Benih/Bibit Ternak* *2) Tersedianya Hijauan Pakan Ternak*	*1) 322 Ekor* *2) 2 Stek/Pols*	*10.923.870.000*		*1) 322 Ekor* *2) 2 Stek/Pols*	*3.505.000.000*
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	2320 Ekor	4.533.870.000			-
	Pengadaan Ternak Ayam Petelur (ASPIRASI)		*1000*	*200.000.000*	*Kota Bangun,*		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	

	Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	Pengadaan Ternak Ayam Potong (ASPIRASI)		*1000*	*200.000.000*	*Muara Kaman, Rantau Hempang,*		
	Pengadaan Bibit Ternak Babi (ASPIRASI)		*50*	*128.450.000*	*Kab. Kutai Kartanegara*		
	Pengadaan Bibit Ternak Kambing Peranakan Etawa Betina		*100*	*450.300.000*	*Kab. Kutai Kartanegara*		
	Pengadaan Bibit Ternak Sapi Betina		*150*	*2.887.200.000*	*20 Kecamatan*		
	Pengadaan Bibit Ternak Kerbau Jantan		*20*	*667.920.000*	*Kab. Kutai Kartanegara*		
3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	163 Dosis	6.235.000.000			-
	PENGADAAN TERNAK KAMBING		*1*	*200.000.000*	*Tenggarong Seberang, Bukit Pariaman,*		
	Pengadaan bibit Ternak babi		*1*	*150.000.000*	*Tenggarong Seberang, Bukit Pariaman,*		
	Pengadaan bibit Ternak Sapi		*12*	*250.000.000*	*Giri Agung,*		
	Pengadaan bibit Ternak Sapi		*6*	*200.000.000*	*Sedulang, Muara Kaman,*		
	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		*6*	*3.405.000.000*	*Muara Muntai, Tenggarong, Kota Bangun, Muara Kaman, Tenggarong Seberang, Muara*		

					Wis,		
	Pengadaan bibit Ternak Kambing		*30*	*180.000.000*	*Tenggarong Seberang, Karang Tunggal,*		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	Pengadaan bibit Ternak Kambing		*30*	*180.000.000*	*Muara Kaman, Muara Kaman Ilir,*		
	Pengadaan bibit Ternak Sapi		*10*	*200.000.000*	*Sedulang, Muara Kaman,*		
	Pengadaan bibit Ternak Kambing		*25*	*150.000.000*	*Kota Bangun Ilir,*		
	Pengadaan bibit Ternak Kambing		*25*	*150.000.000*	*Kota Bangun, Liang,*		
	Pengadaan bibit Ternak Sapi		*12*	*170.000.000*	*Kembang Janggut, Perdana,*		
	KELOMPOK TERNAK “AYAM MAKMUR MANDIR “DESA BUKN RAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG PEMBUATAN KANDANG AYAM		*1*	*200.000.000*	*Tenggarong Seberang,*		
	KELOMPOK UNGGAS “ PETANI UNGGAS MILENTAL “DESA BUKP RAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG		*1*	*200.000.000*	*Tenggarong Seberang,*		

	PENGADAAN PAXAN DAN ITIK (MNETOK) DAN BEBEK						
	KELOMPOK TERNAK "JASA SAUDARA JAYA " DESA BUKIT RAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG PEMBUATAN GUDANG PAKAN DAN BIBIT TERNAK SAPI		*1*	*200.000.000*	*Bukit Raya,*		
	KELOMPOK TERNAK" AYAM MANDIR SEJAHTERA "DESA BUKP RAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG PEMBUATAN KANDANG AYAM		*1*	*200.000.000*	*Tenggarong Seberang,*		
	KELOMPOK TERNAK " BUKIT JAYA SUAHTERA " DESA BUKIT RAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG PENGADAAN BIBP TERNAK KAMBING		*1*	*200.000.000*	*Bukit Raya,*		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
3.27.02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2 Ton	155.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	15000 Ada / Tidak Ada	100.000.000
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1) Panjang Jalan Usaha Tani Yang Dibangun 2) Jumlah Embung Pertanian Yang Dibangun	1) 12500 Meter 2) 21 Unit 3) 10000 Meter 4) 4 Unit	62.240.808.950		1) 10500 Meter 2) 19 Unit 3) 7500 Meter 4) 3 Unit	26.261.000.000

		3) Panjang Jaringan Irigasi Yang Dibangun 4) Jumlah DAM Parit Yang Dibangun 5) Jumlah Pintu Air Yang Dibangun	5) 19 Unit			5) 19 Unit	
3.27.03.2.01	*Pengembangan Prasarana Pertanian*	*Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun*	*97 Unit*	*1.000.000.000*		*104 Unit*	*1.000.000.000*
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	800.000.000	Kab. Kutai Kartanegara		-
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	24 Laporan	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	24 Kali	200.000.000
3.27.03.2.02	*Pembangunan Prasarana Pertanian*	*Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan*	*1 Dokumen*	*61.240.808.950*		*1 Dokumen*	*25.261.000.000*
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	28 Unit	22.398.308.950			-
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		*25*	*20.125.000.000*	*Loa Kulu, Tenggarong, Sebulu, Muara Kaman, Tenggarong Seberang, Marang Kayu,*		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	

	Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	Pembangunan irigasi perpipaan/perpompaan		*3*	*2.273.308.950*	*Jahab, Bukit Biru, Rampak Lambur,*		
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara		-
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	15 Unit	8.062.500.000	Loa Kulu, Tenggarong, Sebulu, Muara Kaman, Tenggarong Seberang, Marang Kayu,	19 Unit	4.611.000.000
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	24 Unit	21.750.000.000		10500 Persen	10.900.000.000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		*20*	*20.900.000.000*	*Muara kaman, Sebulu, Tenggarong, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Marangkayu dan Kota Bangun*		
	Peningkatan Jalan Kelompok Tani Lebak Tanah Desa Muara Leka RT4		*1*	*200.000.000*	*Muara Leka,*		
	Peningkatan Jalan Kelompok Tani Lebak Tanah Desa Muara Le ka RT4		*1*	*250.000.000*	*Muara Leka,*		

	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang		*1*	*200.000.000*	*Bangun Rejo,*		
	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang		*1*	*200.000.000*	*Bangun Rejo,*		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	2.900.000.000	20 Kecamatan	3 Unit 2 Unit	900.000.000
3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	19 Unit	2.800.000.000	20 Kecamatan	33 Unit	800.000.000
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	400.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	11 Unit	400.000.000
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	36 Unit	2.730.000.000		4500 Meter 33 Unit 3 Unit	550.000.000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		*4*	*2.250.000.000*	*20 Kecamatan*		
	Pengadaan Kandang Kambing (POKIR)		*1*	*150.000.000*	*Kota Bangun, Liang,*		

	Pengadaan Kandang Kambing		*30*	*180.000.000*	*Muara Kaman, Muara Kaman Ilir,*		
	Pengadaan Kandang Kambing		*1*	*150.000.000*	*Kota Bangun, Liang,*		
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1) Persentase Derajat Kesehatan Ternak 2) Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	1) 96 Persen 2) 5 Jenis	975.000.000		1) 97 Persen 2) 5 Jenis	975.000.000
3.27.04.2.01	*Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular*	*100 Persen*	*250.000.000*		*100 Persen*	*250.000.000*

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	20 Wilayah	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara		-
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	150 Laporan	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara		-
3.27.04.2.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	2 Laporan	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	80 Persen	100.000.000
3.27.04.2.02	*Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan*	*Jumlah Pengawasan*	*2 Jenis*	*200.000.000*		*2 Jenis*	*200.000.000*

	Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota						
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	2 laporan	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara		-
3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	3 Laporan	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara		-
3.27.04.2.03	*Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Penerapan dan Pengawasan Teknis Kesmavet*	*2 Jenis*	*300.000.000*		*2 Jenis*	*300.000.000*
3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	2 Laporan	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	4 Jenis	100.000.000
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2 Laporan	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	1000 Kali	200.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
3.27.04.2.04	*Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner*	*Cakupan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Perkebunan*	*3 Persen*	*225.000.000*		*3 Persen*	*225.000.000*
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha	Jumlah unit usaha produk hewan yang	7 Unit Usaha	75.000.000	Kab. Kutai		-

	Produk Hewan	diawasi terhadap penerpan cara yang baik Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	0 Unit Usaha		Kartanegara		
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	30 Laporan	75.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	266 Unit	75.000.000
3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	70 Dokumen	75.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	5 Jenis	75.000.000
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	95 Persen	3.050.000.000		100 Persen	3.050.000.000
3.27.05.2.01	*Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota*	*Luas pengendalian OPT Pertanian*	*2400 Hektar (Ha)*	*3.050.000.000*		*2400 Hektar (Ha)*	*3.050.000.000*
3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	200 Laporan	1.000.000.000	Kab. Kutai Kartanegara		-
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	2000 Ha	1.100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	18 Kecamatan 3000 Unit	1.100.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan,	2000 Ha	800.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	313 Hektar (Ha)	500.000.000

	Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani					
3.27.05.2.01.04	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	90 laporan	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	200 Ekor 10 Ekor 7 Kecamatan	150.000.000
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Rekomendasi Usaha Pertanian yang dikeluarkan	35 Rekomendasi	1.150.000.000		35 Rekomendasi	400.000.000
3.27.06.2.01	*Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Fasilitasi Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*20 Surat*	*700.000.000*		*20 Surat*	*250.000.000*
3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	20 Laporan	700.000.000	Kab. Kutai Kartanegara		-
3.27.06.2.02	*Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan*	*Jumlah Penerbitan Izin Usaha Ternak*	*15 Dokumen*	*450.000.000*		*15 Dokumen*	*150.000.000*
3.27.06.2.02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	7 Dokumen	450.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	150.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	4 Persen	12.849.000.000		5 Persen	7.800.000.000
3.27.07.2.01	*Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian*	*Cakupan lembaga petani yang dibina*	*95 Persen*	*12.849.000.000*		*100 Persen*	*7.800.000.000*
3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	3 Unit	500.000.000	Kab. Kutai Kartanegara		-
3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1 Dokumen	600.000.000	Kab. Kutai Kartanegara		-
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	19 Unit	3.374.000.000		90 Unit	3.000.000.000
	fasilitasi lembaga Balai Penyuluh Pertanian		*1*	*150.000.000*	*Tenggarong,*		
	fasilitasi lembaga Balai Penyuluh Pertanian		*1*	*150.000.000*	*Loa Kulu,*		
	fasilitasi penyuluhan dan pendataan		*1*	*150.000.000*	*Muara Badak,*		
	fasilitasi lembaga Balai Penyuluh Pertanian		*1*	*150.000.000*	*Muara Jawa,*		
	fasilitasi lembaga Balai Penyuluh Pertanian		*1*	*150.000.000*	*Tenggarong Seberang,*		
	fasilitasi lembaga Balai Penyuluh Pertanian		*1*	*150.000.000*	*Kota Bangun,*		
	fasilitasi lembaga Balai Penyuluh Pertanian		*1*	*150.000.000*	*Anggana,*		

	fasilitasi lembaga Balai Penyuluh Pertanian		*1*	*150.000.000*	*Muara Wis,*		
	fasilitasi lembaga Balai Penyuluh Pertanian		*1*	*150.000.000*	*Sanga Sanga,*		
	fasilitasi lembaga Balai Penyuluh Pertanian		*1*	*150.000.000*	*Tenggarong Seberang,*		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	fasilitasi lembaga Balai Penyuluh Pertanian		*1*	*150.000.000*	*Muara Muntai,*		
	fasilitasi lembaga Balai Penyuluh Pertanian		*1*	*150.000.000*	*Loa Janan,*		
	fasilitasi lembaga Balai Penyuluh Pertanian		*1*	*150.000.000*	*Sebulu,*		
	fasilitasi lembaga Balai Penyuluh Pertanian		*1*	*150.000.000*	*Marang Kayu,*		
	fasilitasi lembaga Balai Penyuluh Pertanian		*1*	*150.000.000*	*Muara Kaman,*		
	fasilitasi lembaga Balai Penyuluh Pertanian		*1*	*150.000.000*	*Tabang,*		
	fasilitasi lembaga Balai Penyuluh Pertanian		*1*	*150.000.000*	*Kenohan,*		

	fasilitasi lembaga Balai Penyuluh Pertanian		*1*	*150.000.000*	*Samboja,*		
	fasilitasi lembaga Balai Penyuluh Pertanian		*1*	*150.000.000*	*Kembang Janggut,*		
	bimbingan teknologi dan pelatihan		*0*	*524.000.000*	*Prov. Kalimantan Timur,*		
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3049 Unit	2.675.000.000		2510 Unit	2.200.000.000
	Studi Tiru Bidang Pertanian / Green House (Aspirasi)		*1*	*75.000.000*	*Loa Janan,*		
	PEDA XI Kutai Barat		*1*	*1.200.000.000*	*Kutai Barat*		
	pembinaan dan pengawasan kelembagaan petani		*2947*	*1.200.000.000*	*20 Kecamatan*		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Dalam Pemafaatan Sumberdaya Pekarangan		*100*	*200.000.000*	*Kab. Kutai Kartanegara*		
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	19 Unit	3.800.000.000		19 Lembaga 7 Lembaga 5 Kelompok 15 Jenis 1 Lembaga 90 Unit	2.000.000.000
	pengembangan sarana dan prasarana balai penyuluhan		*1*	*200.000.000*	*Tenggarong,*		

	pertanian						
	pengembangan sarana dan prasarana balai penyuluhan pertanian		*1*	*200.000.000*	*Loa Kulu,*		
	pengembangan sarana dan prasarana balai penyuluhan pertanian		*1*	*200.000.000*	*Muara Badak,*		
	pengembangan sarana dan prasarana balai penyuluhan pertanian		*1*	*200.000.000*	*Muara Jawa,*		
	pengembangan sarana dan prasarana balai penyuluhan pertanian		*1*	*200.000.000*	*Tenggarong Seberang,*		
	pengembangan sarana dan prasarana balai penyuluhan pertanian		*1*	*200.000.000*	*Kota Bangun,*		
	pengembangan sarana dan prasarana balai penyuluhan pertanian		*1*	*200.000.000*	*Anggana,*		
	pengembangan sarana dan prasarana balai penyuluhan pertanian		*1*	*200.000.000*	*Muara Wis,*		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
	pengembangan sarana dan prasarana balai penyuluhan pertanian		*1*	*200.000.000*	*Sanga Sanga,*		
	pengembangan sarana dan		*1*	*200.000.000*	*Tenggarong*		

	prasarana balai penyuluhan pertanian				*Seberang,*		
	pengembangan sarana dan prasarana balai penyuluhan pertanian		*1*	*200.000.000*	*Muara Muntai,*		
	pengembangan sarana dan prasarana balai penyuluhan pertanian		*1*	*200.000.000*	*Loa Janan,*		
	pengembangan sarana dan prasarana balai penyuluhan pertanian		*1*	*200.000.000*	*Sebulu,*		
	pengembangan sarana dan prasarana balai penyuluhan pertanian		*1*	*200.000.000*	*Marang Kayu,*		
	pengembangan sarana dan prasarana balai penyuluhan pertanian		*1*	*200.000.000*	*Muara Kaman,*		
	pengembangan sarana dan prasarana balai penyuluhan pertanian		*1*	*200.000.000*	*Tabang,*		
	pengembangan sarana dan prasarana balai penyuluhan pertanian		*1*	*200.000.000*	*Kenohan,*		
	pengembangan sarana dan prasarana balai penyuluhan pertanian		*1*	*200.000.000*	*Samboja,*		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif

	pengembangan sarana dan prasarana balai penyuluhan pertanian		*1*	*200.000.000*	*Kembang Janggut,*		
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	10 Unit	1.900.000.000		21 Orang	300.000.000
	sekolah lapang pertanian		*1*	*300.000.000*	*Muara Badak,*		
	sekolah lapang pertanian		*1*	*300.000.000*	*Muara Jawa,*		
	sekolah lapang pertanian		*2*	*300.000.000*	*Tenggarong Seberang,*		
	sekolah lapang pertanian		*2*	*300.000.000*	*Kota Bangun,*		
	sekolah lapang pertanian		*2*	*300.000.000*	*Anggana,*		
	sekolah lapang pertanian		*2*	*400.000.000*	*Muara Wis,*		
Total				226.199.330.224			104.918.181.827

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini selanjutnya digunakan sebagai landasan operasional dimana isinya lebih memusatkan pada tujuan, sasaran jangka pendek.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini telah disusun dengan melibatkan hampir seluruh stakeholder yang terkait di Kabupaten Kutai Kartanegara seperti Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendukung pembangunan Embung Pertanian, sehingga diharapkan pelaksanaan dari seluruh rencana yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara baik oleh semua pihak yang terkait, baik unsur internal yaitu semua bidang dalam lingkup Dinas, Sekretariat maupun Kelompok Jabatan Fungsional.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini adalah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dan sebagai bentuk perencanaan pembangunan disusun atas dasar tujuan, sasaran serta kebijakan-kebijakan strategis, hal ini akan digunakan sebagai implementasi kegiatan di lapangan yang diharapkan terjadi kesinergian/keterpaduan dalam langkah dan gerak pelaksanaan tugas dari aparatur Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sehubungan hal tersebut maka ditetapkan beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan Renja yang telah disusun sebagai berikut :

1. Renja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 harus dilaksanakan secara konsisten dan terpadu melalui kerjasama pihak yang berfungsi sebagai manajerial yaitu Sekretariat dan pihak yang mengemban proses utama kegiatan yaitu semua bidang dalam lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Renja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah perencanaan yang bersifat top down dan bottom up planning sehingga dalam pelaksanaannya keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan khususnya pelaku usaha sektor pertanian baik petani, lembaga petani, pengusaha sektor pertanian dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
3. Renja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 akan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Implementasi Renja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan membutuhkan manajemen yang baik dalam pelaksanaanya. Kegiatan manajerial tersebut meliputi pengorganisasian (organizing), Pelaksanaan itu sendiri (actuating) dan evaluasi (controlling), berdasarkan hal tersebut maka perlu dirumuskan Rencana Tindak Lanjut dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, antara lain :

1. Dalam pelaksanaannya Renja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 akan dilaksanakan dengan keterlibatan semua elemen dalam Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara (internal) dan elemen di luar Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara, keterlibatan elemen internal tersebut Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan khususnya pelayanan pada pelaku usaha

pertanian baik petani, lembaga petani (kelompok tani, gabungan kelompok tani) maupun sektor privat yang bergerak pada sektor pertanian.

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

y.RENJA DINAS PERKEBUNAN

BAB 1.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Urusan Perkebunan pada dasarnya berbasiskan sumberdaya domestik yang dapat diperbaharui (renewable resources). Selain itu Sub Sektor Perkebunan tidak saja memberikan kontribusi yang berarti bagi Pembangunan secara umum maupun Devisa Negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi juga merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk di pedesaan.

Memperhatikan peranan sub sektor Perkebunan, tantangan dan peluang yang dihadapi serta tuntutan pembangunan yang semakin transparan pada era otonomi daerah saat ini, maka arah pengembangan sub sektor Perkebunan lima Tahun ke depan adalah menumbuhkan dan mengembangkan agribisnis untuk mewujudkan perkebunan yang tangguh menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan melalui Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam, Sosial Budaya dan Teknologi yang berwawasan lingkungan untuk mengantisipasi berbagai perubahan dan perkembangan pasar dunia, mengingat produk- produk perkebunan yang dihasilkan sebagian besar untuk tujuan ekspor.

Peranan lebih nyata dalam kondisi krisis dimana sektor lainnya mengalami kesulitan untuk berkembang, sub sektor perkebunan menjadi salah satu andalan dalam mendukung kesinambungan pembangunan nasional dan daerah termasuk penanganan permasalahan jangka pendek seperti pencukupan kebutuhan pangan, penyediaan lapangan kerja serta perolehan dan penghematan devisa melalui kegiatan ekspor. Secara nasional sub sektor perkebunan juga telah memberikan kontribusi dalam menekan kesenjangan struktural dan spasial melalui peningkatan pendapatan petani dan penyebaran sentra produksi perkebunan, membuka peluang pengembangan agroindustri dan menyediakan bahan baku industri dalam negeri, mendukung pertumbuhan wilayah dan sektor lainnya, serta mendukung kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka kebijaksanaan pembangunan perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dan RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 diarahkan pada terciptanya kondisi yang kondusif untuk tumbuh, berkembang dan berdayanya sistem perekonomian yang memberikan peluang bagi segenappelaku ekonomi secara proporsional yang terkait secara fungsional sehinggap membentuk kekuatan ekonomi wilayah yang sinergis dengan sektor lainnya.

Mengacu pada kenyataan tersebut, maka diperlukan beberapa program pembangunan perkebunan diantaranya peningkatan kuantitas dan kualitas komoditas andalan/unggulan daerah yang dilakukan antara lain dengan menata berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kawasan andalan yang dikaitkan dengan program pengembangan agroindustri dan agribisnis. Program-program yang dilaksanakan diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi wilayah, sebab mempunyai peluang untuk tidak lagi memasarkan hasil komoditas perkebunan dalam bentuk bahan mentah, tetapi telah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Sehingga harganya tidak terlalu peka terhadap fluktuasi harga komoditas dipasaran dunia. Disamping itu secara langsung akan memperbaiki struktur ekonomi daerah yang diharapkan akan mampu menunjang peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut maka perlu disusun adanya Rencana Kerja (RENJA) sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang terarah, transparan, partisipatif, terpadu dan akuntabel.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pelaksanaan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8 Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9 Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

15 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai KartanegaraTahun 2025 adalah :

Membuat rumusan-rumusan perencanaan pembangunan perkebunan secara terpadu,sinergis dan berkelanjutan.

1. Membuat dan menetapkan indikator-indikator Pengukuran capaian tujuan dan sasarankinerja OPD.
2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sektor Perkebunan di KabupatenKutai Kartanegara.
3. Sebagai arah pembangunan perkebunan yang ingin dicapai dalam kurun 5 Tahun yang disusun berdasarkan tupoksi penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah.
4. Memprediksi kebutuhan yang diperlukan dalam membangun perkebunan selama 1 Tahunmendatang.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai KartanegaraTahun 2025 adalah :

1. Sebagai pedoman melaksanakan pembangunan perkebunan bagi jajaran Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk satu Tahun ke depan. Menjamin agar pelaksanaan pembangunan perkebunan dapat berjalan efisien, efektif dan produktif.
2. Mengarahkan kegiatan-kegiatan pembangunan perkebunan untuk menciptakan lapangankerja, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan.
3. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi pembangunan perkebunan selama 1 Tahun.

1.3. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan;

Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renja.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;

Dalam bab ini memuat perlunya dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, juga analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap Rancangan RKPD/Renstra Perangkat Daerah.

BAB III. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah;

Dalam Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan apa tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

BAB IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah; Dalam Bab ini memuat Program dan Kegiatan

BAB V. Penutup;

BAB 2.
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Usulan anggaran pada Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 sebesar Rp35.182.946.475,-, terdiri dari 35 Sub Kegiatan, 15 kegiatan dalam 6 program. Dimana alokasi anggaran yang terakomodir pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 sebesar Rp45.826.570.598,-, terdiri dari 34 Sub Kegiatan, 15 kegiatan dan 6 program. Sedangkan pada DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 anggaran bertambah menjadi Rp52.389.844.136,-, dengan sub kegiatan bertambah menjadi 36 Sub Kegiatan, kegiatan bertambah menjadi 16 kegiatan dengan jumlah program sebanyak 6 program, dengan realisasi keuangan sebesar Rp45.806.555.527,- atau 87,40% sedangkan realisasi fisik sebesar 100,00%.

Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 didukung oleh 6 (enam) program, dimana terdapat program yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target dan melebihi target, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, yaitu :

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat (Ha)	28.645,00	30.433,77	106,24%
		2. Luas Areal Kelapa Sawit PBS (Ha)	237.435,00	199.736,68	84,12%
		3. Luas Areal Karet(Ha)	17.928,00	18.080,80	100,85%
		4. Luas Areal Lada(Ha)	3.412,00	3.016,36	88,40%
		5. Luas Areal Kelapa Dalam (Ha)	7.291,00	6.886,07	94,45%
		6. Luas Areal Kopi(Ha)	89,00	109,50	123,03%
		7. Luas Areal Kakao(Ha)	85,00	122,15	143,71%

		8. Luas Areal Aren(Ha)	243,00	251,95	103,68%
		9. Luas Areal Kelor(Ha)	7,00	3,50	50,00%

2. Realisasi program yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, yaitu :

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan GangguanOPT Perkebunan	72,00%	72,00%	100,00%
2	PenyuluhanPertanian	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	9,76%	9,76%	100,00%

3. Realisasi program yang melebihi target kinerja yang direncanakan, yaitu :

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,00 %	86,00%	110,26%
2	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	3.600 Meter	7.000 Meter	194,44%
		2. Jumlah Embung Yang Dibangun	4 Unit	2 Unit	50,00%
3	Perizinan Usaha Pertanian	1. Jumlah Penerbitan STDB	200 Surat (STDB)	200 Surat (STDB)	100,00%
		2. Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat PenilaianUsaha Perkebunan(PUP)	3 Surat (PUP)	9 Surat(PUP)	300,00%

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program :

Faktor penyebab target program yang tidak tercapai target kinerjanya antara lain : Terjadi bencana banjir sehingga menghambat penambahan luas Areal Kelapa Sawitpada Perusahaan Besar Swasta, dan alih fungsi lahan pada komoditi lada dan kelapa dalam, serta

banyaknya bibit kelor kelor yang mati karena terserang hama penyakit. Kemudian terjadi kenaikan harga material yang berakibat berkurangnya panjang jalan produksi perkebunan yang dibangun. Sedangkan capaian jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) disebabkan oleh adanya perusahaan yang belum siap untuk dilakukan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) ditambah dengan terbatasnya tenaga Penilai PUP yang dimiliki dinas.

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja para penyuluh yang ada di lapangan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan.

Sedangkan faktor penyebab target program melebihi target kinerja program adalah meningkatnya minat para pekebun untuk mengembangkan komoditas perkebunan, seiring dengan membaiknya harga pasar beberapa komoditas perkebunan, serta berhasilnya pengendalian Gangguan OPT Perkebunan baik yang dilaksanakan oleh dinas maupun yang dilaksanakan swadaya oleh para pekebun.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Dengan adanya capaian program Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023

   implikasi yang timbul adalah diperlukannya : (1) Penetapan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai antisipasi alih fungsi lahan komoditas perkebunan, (2) Pengendalian serangan OPT perlu dilakukan secara cepat sehingga kerusakan yang ditimbulkannya dapat dikurangi, dan (3) Penambahan kuota pupuk subsidi komoditas perkebunan.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasifaktor-faktor penyebab tersebut :

   1) Peningkatan perlindungan tanaman serta penanggulangan bencana dan gangguanusaha perkebunan.
   2) Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha perkebunan.
   3) Peningkatan penyuluhan perkebunan dan pengembangan pekebun milenia.
   4) Pengembangan kemitraan usaha perkebunan yang produktif dan sehat danpengolahan hasil perkebunan.

Adapun capaian kinerja dari program dan kegiatan pembangunan perkebunan diimplementasikan melalui kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel T-C.29. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PerkebunanKabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, dibawah ini :

Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan Dan Pencapaian Renstra Dinas Perkebunan KabupatenKutai Kartanegara Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PDTahun 2024)	Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja-PD Tahun (2023)	Realisasi Renja-PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,50	82,00	78,00	86,00	110,26	78,50	86,00	108,18
	1) Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah*	*45 Dokumen*	*20 Dok*	*9 Dokumen*	*9 Dokumen*	*100,00*	*6 Dokumen*	*35 Dokumen*	*77,78*
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah	15 Dokumen	7 Dok	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	3 Dokumen	13 Dokumen	86,67

	2 Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00	2 Laporan	8 Laporan	80,00
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00	1 Laporan	13 Laporan	65,00
	2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerahyang akuntabel*	*75 Laporan*	*30 Laporan*	*15 Laporan*	*15 Laporan*	*100,00*	*15 Laporan*	*60 Laporan*	*80,00*
	4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ bulan	24 Orang/ bulan	12 Orang/ bulan	12 Orang/ bulan	100,00	12 Orang/ bulan	48 Orang/ bulan	80,00
	5 Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	75 laporan	*30 Laporan*	*15 Laporan*	*15 Laporan*	*100,00*	*15 Laporan*	*60 Laporan*	*80,00*
	3) Administrasi Barang Milik Daerah pada PerangkatDaerah	*Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada PerangkatDaerah*	*5 Dokumen*	*2 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*100,00*	*1 Dokumen*	*4 Dokumen*	*80,00*
	6 Pengamanan BarangMilik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen PengamananBarang Milik Daerah SKPD (Disbun)	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	2 Dokumen	66,67

	7 Rekonsiliasi dan Penyusunan LaporanBarang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi danPenyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	4 Laporan	80,00
	8 Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD	Jumlah Laporan PenatausahaanBarang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	4 Laporan	80,00
	4) Administrasi PendapatanDaerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*	*5 Dokumen*	-	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*100,00*	*1 Dokumen*	*2 Dokumen*	*40,00*
	9 Pelaporan PengelolaanRetribusi Daerah	Jumlah Laporan PengelolaanRetribusi Daerah	5 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	2 Laporan	40,00
	5) Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah	*Jumlah Dokumen AdministrasiKepegawaian*	*10 Dokumen*	*4 Dokumen*	*3 Dokumen*	*3 Dokumen*	*100,00*	*2 Dokumen*	*9 Dokumen*	*90,00*
	10 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan	534 Paket	-	379 Paket	379 Paket	100,00	0 Paket	379 Paket	70,97
	11 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan	121 Orang	31 Orang	22 Orang	22 Orang	100,00	22 Orang	53 Orang	61,98
	12 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	75 Orang	30 Orang	15 Orang	15 Orang	100,00	15 Orang	60 Orang	80,00

	Perundang-Undangan	Perundang-Undangan								
	6) Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan AdministrasiUmum Perangkat Daerah*	*35 Layanan*	*14 Layanan*	*6 Layanan*	*6 Layanan*	*100,00*	*6 Layanan*	*26 Layanan*	*74,29*
	13 Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/ Penerangan BangunanKantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	35 Paket	13 Paket	7 Paket	7 Paket	100,00	7 Paket	*27 Layanan*	*77,14*
	14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yangDisediakan	175 Paket	65 Paket	30 Paket	30 Paket	100,00	30 Paket	125 Paket	71,43
	15 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	15 Paket	13 Paket	13 Paket	100,00	13 Paket	41 Paket	82,00
	16 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakandan Penggandaan yang Disediakan	23 Paket	6 Paket	4 Paket	4 Paket	100,00	4 Paket	14 Paket	30,87
	17 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, PeraturanPerundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	25.200 Eksemplar	3.000 Eksemplar	-	-	-	-	3.000 Eksemplar	11,90
	18 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.460 Laporan	1,228 Laporan	660 Laporan	660 Laporan	100,00	660 Laporan	2.548 Laporan	103,58
	19 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.760 Dokumen	2.696 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	2.698 Dokumen	39,91

	7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	*60 Bulan*	*24 Bulan*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	*100,00*	*12 Bulan*	*48 Bulan*	*80,00*
	20 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	11 Laporan	100,00	12 Laporan	47 Laporan	78,33
	21 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	48 Laporan	80,00
	22 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	48 Laporan	80,00
	8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah*	*624 Unit*	*188 Unit*	*107 Unit*	*107 Unit*	*100,00*	*102 Unit*	*397 Unit*	*63,62*
	23 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yangDipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	611 Unit	183 Unit	101 Unit	101 Unit	100,00	99 Unit	383 Unit	62,68

	24 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	5 Unit	6 unIt	6 unIt	100,00	3 unIt	14 Unit	107,69
2	Penyediaan Dan Pengembangan SaranaPertanian	1. Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat	28.880 Ha	30.102 Ha	28.645 Ha	30,433 Ha	106,24	28.720 Ha	30,433 Ha	105,38
		2. Luas Areal Kelapa Sawit PBS	346.255 Ha	196.743 Ha	237.435 Ha	199,736 Ha	84,12	268.526 Ha	268.526 Ha	77,55
		3. Luas Areal Karet	18.033 Ha	18.009 Ha	17.928 Ha	18.080 Ha	100,85	17.958 Ha	18.080 Ha	100,26
		4. Luas Areal Lada	3.452 Ha	3.178 Ha	3.412 Ha	3.016 Ha	88,39	3.427 Ha	3.016 Ha	87,37
		5. Luas Areal Kelapa Dalam	7.311 Ha	7.107 Ha	7.291 Ha	6.886 Ha	94,45	7.301 Ha	6.886 Ha	94,19
		6. Luas Areal Kopi	125 Ha	84 Ha	89 Ha	109 Ha	122,47	110 Ha	120 Ha	96,00
		7. Luas Areal Kakao	100 Ha	82 Ha	85 Ha	122 Ha	143,53	95 Ha	122 Ha	122,00
		8. Luas Areal Aren	253 Ha	256 Ha	243 Ha	251 Ha	103,29	248 Ha	251 Ha	99,21
		9. Luas Areal Kelor	9 Ha	1,50 Ha	7 Ha	3,50 Ha	50,00	9 Ha	4,5 Ha	50,00
	9) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Jumlah Sarana PendukungPertanian Yang Diawasi*	*1.284 Paket*	*516 Paket*	*584 Paket*	*1.428 Paket*	*244,52*	*777 Paket*	*2.721 Paket*	*211,92*
	25 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	92 Laporan	48 Laporan	37 Laporan	37 Laporan	100,00	46 Laporan	131 Laporan	142,39
	10) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan SumberDaya Genetik (SDG) Hewan danTumbuhan*	*6 Komoditi*	*1 Komoditi*	*1 Komoditi*	*1 Komoditi*	100,00	*1 Komoditi*	*3 Komoditi*	50,00
	26 Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00

3	Penyediaan Dan Pengembangan PrasaranaPertanian	1. Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	20.000 Meter	3.500 Meter	3.600 Meter	7.000 Meter	194,44	6.000 Meter	16.500 Meter	82,50
		2. Jumlah Embung YangDibangun	20 Unit	3 Unit	4 Unit	2 Unit	50,00	2 Unit	7 Unit	35,00
	11) Pengembangan Prasarana Pertanian	*Jumlah Prasarana PertanianYang Dikembangkan*	*8 Dokumen*	*3 Dokumen*	*0 Dokumen*	*0 Dokumen*	0,00	*0 Dokumen*	*3 Dokumen*	37,50
	27 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	5 Laporan	*2* Laporan	0 Laporan	Laporan	0,00	0 Laporan	2 Laporan	40,00
	28 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasandan Komoditas Perkebunan	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	1 Dokumen	33,33
	12) Pembangunan PrasaranaPertanian	*Jumlah Prasarana PertanianYang Dibangun*	*50 Unit*	*16 Unit*	*21 Unit*	*22 Unit*	104,76	*65 Unit*	*103 Unit*	206,00
	29 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan JaringanIrigasi Usaha Tani	Panjang Parit Kebun YangDirehabilitasi	8 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	100,00	7 Unit	9 Unit	112,50
	30 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung	Jumlah Embung YangDibangun	20 Unit	3 Unit	2 Unit	2 Unit	100,00	2 Unit	7 Unit	35,00

	31 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pertanian lainnya	Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	40 Unit	7 Unit	10 Unit	14 Unit	140,00	12 Unit	33 Unit	82,50
	32 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Kebun YangDirehabilitasi	25 Unit	4 Unit	8 Unit	8 Unit	100,00	21 Unit	33 Unit	132,00
	33 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan PrasaranaPertanian Lainnya	Jumlah Unit Pengolah Hasil	5 Unit	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	1 Unit	3 Unit	60,00
4	Pengendalian Dan Penanggulangan BencanaPertanian	Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan	20,00%	91,47%	72,00%	72,00%	100,00	56,00%	56,00%	35,71
	13) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Luas Pengendalian OPT DanBencana Perkebunan*	*1.200 Ha*	*300 Ha*	*220 Ha*	*220 Ha*	*100,00*	*240 Ha*	*760 Ha*	*63,33*
	34 Pengendalian OrganismePengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) TanamanPangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	560 Ha	102 Ha	110 Ha	110 Ha	100,00	120 Ha	332 Ha	59,29
	35 Penanganan DampakPerubahan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI)	24.200 Ha	22.050 Ha	22.650 Ha	22.650 Ha	100,00	23.200 Ha	23.200 Ha	95,87

	Iklim (DPI)Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tanaman Pangan, Hortikultura,dan Perkebunan yang Ditangani								
	36 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura,dan Perkebunan	130 Ha	40 Ha	100 Ha	100 Ha	100,00	100 Ha	240 Ha	184,62
5	Perizinan Usaha Pertanian	1. Jumlah Penerbitan STDB	1.000 Surat (STDB)	362 Surat (STDB)	200 Surat (STDB)	200 Surat (STDB)	100,00	200 Surat (STDB)	762 Surat (STDB)	76,20
		2. Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat PenilaianUsaha Perkebunan (PUP)	47 Surat (PUP)	22 Surat (PUP)	3 Surat (PUP)	9 Surat (PUP)	300,00	20 Surat (PUP)	51 Surat (PUP)	108,51
	14) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemegang Tanda DaftarBudidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang Dib*	*1.047 Pelaku*	*384 pelaku*	*212 pelaku*	*208 pelaku*	*98,11*	*220 pelaku*	*812 pelaku*	*77,55*
	37 Pembinaan dan Pengawasan PenerapanIzin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanianyang Dibina dan Diawasi	1.047 Laporan	384 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00	-	387 Laporan	36,96
	38 Pembinaan dan Pengawasan Penerapanstandar dan Izin Usaha	Jumlah Izin Usaha Pertanianyang Dibina dan Diawasi						2 Laporan	2 Laporan	100,00

	Pertanian									
6	Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	24,60%	4,80%	9,76%	9,76%	100,00	14,63%	14,63%	59,47
	15) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Kelompok Tani yang dibina*	*241 Lembaga*	*69 Lembaga*	*49 Lembaga*	*49 Lembaga*	*100,00*	*46 Lembaga*	*164 Lembaga*	*68,05*
	39 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	232 Unit	65 Unit	47 Unit	47 Unit	100,00	46 Unit	158 Unit	68,10
	40 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	9 Unit	6 Unit	2 Unit	2 Unit	100,00		8 Unit	88,89
	41 Diseminasi InformasiTeknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasiteknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian						1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
Capaian Kinerja					Tahun 2023 Predikat "Sangat Baik"		115,50	Prakiraan s/d Tahun 2024 Predikat "Baik"		83,60

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran pada RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026 yang telah ditetapkan adalah sebanyak 3 (tiga) Sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan
2. Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan
3. Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun

Adapun target dan capaian kinerja pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dibawah ini :

Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian			Proyeksi Tahun 2024	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
1	1. Produksi Sawit Rakyat (Ton)			250.253	267.635	277.032	286.069	254.921	270.730	291.773	292.874	
	2. Produksi Sawit PBS (Ton)			2.754.458	2.924.513	3.064.670	3.276.022	2.705.032	2.930.000	3.071.285	3.265.404	
	3. Produksi Karet (Ton)			8.891	9.238	9.616	10.031	9.776	9.930	10.293	10.392	
	4. Produksi Lada (Ton)			1.647	1.815	2.001	2.207	2.432	2.480	2.690	2.574	
	5. Produksi Kelapa (Ton)			2.342	2.510	2.706	2.936	2.355	2.620	3.456	3.025	
	6. Produksi Kopi (Ton)			6	8	14	23	7	10	11	25	
	7. Produksi Kakao (Ton)			33	34	39	48	39	40	30	54	
	8. Produksi Aren (Ton)			346	392	446	510	381	402	394	521	
	9. Produksi Kelor (Ton)			3	6	8	12	0,50	6	0,50	15	
2	1. Produktivitas Sawit Rakyat (Kg/Ha)			13.200	14.067	14.510	14.931	13.212	14.200	12.818	15.098	
	2. Produktivitas Sawit PBS (Kg/Ha)			16.521	17.130	17.540	18.330	16.263	17.200	16.286	18.630	
	3. Produktivitas Karet (Kg/Ha)			911	943	978	1.017	1.001	1.050	992	1.106	
	4. Produktivitas Lada (Kg/Ha)			584	639	700	768	865	867	1.035	895	
	5. Produktivitas Kelapa (Kg/Ha)			414	441	472	509	419	450	652	523	
	6. Produktivitas Kopi (Kg/Ha)			243	311	420	517	305	350	356	567	
	7. Produktivitas Kakao (Kg/Ha)			656	681	718	747	755	755	817	840	
	8. Produktivitas Aren(Kg/Ha)			2.428	2.658	2.926	3.255	2.670	2.800	2.702	3.580	
	9. Produktivitas Kelor (Kg/Ha)			1.133	1.233	1.262	1.371	1.000	1.250	1.000	1.471	
3	NTP Perkebunan (Nilai)			96,00	98,00	100,00	102,00	97,00	100,00	166	106,00	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah merupakan Tahun ke empat pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara Tahun 2021-2026, dan telah dirumuskan isu-isu strategis dalam pembangunan perkebunan yang harus tertangani dalam periode 2021-2026, yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

   Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi daya dukung percepatan pembangunan perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dimana dipastikan akan terjadi peningkatan kebutuhan terhadap komoditas perkebunan dalam mendukung pembangunan IKN itu sendiri, seperti kebutuhan komoditi lada, kelapa dalam, kopi, kakao dan aren.

2. Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Dan Andalan Perkebunan

   Peningkatan produktivitas perkebunan dilakukan melalui pengembangan dan intensifikasi tanaman perkebunan yang dititikberatkan pada komoditas unggulan dan andalan berbasis kawasan secara terintegrasi, mulai dari kepastian ketersediaan lahan, penyiapan petani unggul dan dukungan sarana, prasarana dan infratsruktur wilayah. Dimana komoditi yang menjadi komoditi unggulan perkebunan adalah kelapa sawit, karet, lada dan kelapa dalam, sedangkan komoditi andalan perkebunan adalah kopi, kakao dan aren. Disamping juga melakukan peningkatan perlindungan tanaman, dan penanggulangan bencana serta gangguan usaha perkebunan.

3. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkebunan

   Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan melalui peningkatan pengawasan dan pembinaan bagi perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan luas kebun inti dan plasma dari luas lahan IUP yang telah diterbitkan di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 678.980 Ha.

4. Penguatan Kelembagaan, Kemitraan Dan Peningkatan Mutu Serta Nilai Tambah Produk Perkebunan

Penguatan kelembagaan, kemitraan dan peningkatan mutu serta nilai tambah produk perkebunan dilakukan melalui penguatan penyuluhan perkebunan dalam melakukan pendampingan kepada pekebun dan pengembangan pekebun milenial, serta pengembangan kemitraan usaha perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan.

Keempat isu strategis tersebut memiliki arti penting dalam rangka meningkatkan produksi dan nilai jual hasil perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga bisa mendorong laju pertumbuhan sub sektor perkebunan. Isu strategis tersebut menjadi titik tolak dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan.

2.3.1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara

Perencanaan pembangunan Dinas Perkebunan Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari pembangunan Tahun-Tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan Tahun sebelumnya.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan dari hasil capaian kinerja pembangunan perkebunan pada periode lima Tahun sebelumya disebabkan oleh “Belum optimalnya produksi perkebunan dan terjadinya penurunan produksi dari beberapa komoditas unggulan perkebunan, serta rendahnya Pendapatan dan kesejahteraan pekebun”. Permasalahan yang dihadapi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel pemetaan permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1.4. Pemetaan Permasalahan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai KartanegaraTahun 2016-2021

No	Masalah Pokok	Masalah (Penyebab Masalah Pokok)	Akar Masalah
1	Belum optimalnya produksi perkebunan dan terjadinya penurunan produksi dari beberapa komoditas unggulan	1. Produktivitas tanaman perkebunan masih rendah	1. Terbatasnya kuota pupuk subsidi dan lemahnya daya beli pekebun terhadap pupuk non subsidi
			2. Penggunaan bibit yang tidak unggul/tidak bersertifikasi oleh pekebun
			3. Masih lemahnya penerapan teknologi budidaya tanaman Perkebunan
			4. Tanaman yang usianya sudah di atas 25 Tahun (karet)
			5. Gangguan OPT Endemis

	perkebunan		6. Masih kurangnya ketersediaan mesin dan peralatan budidaya dan panen
			7. Tidak memadainya prasarana irigasi pada areal perkebunan, khususnya tanaman kelapa dan lada (pintu air, embung)
			8. Pendangkalan pada saluran parit di kebun kelapa dalam
			9. Kualitas jalan produksi perkebunan belum memadai
			10. Berkurangnya luas areal dan luas tanaman menghasilkan (TM), terutama pada tanaman kelapa dalam, lada, kopi dan kakao.
			11. Banyaknya lahan fungsional tanaman perkebunan yang dialih fungsikan dan alih komoditas
		2. Pemanfaatan lahan oleh perusahaan perkebunan belum optimal.	1. Adanya lahan yang tertumpang tindih dengan perijinan usaha lainnya
			2. Kurangnya ketaatan perusahaan perkebunan dalam melaksanakan ketentuan perizinan
			3. Terdapat bagian dari lahan yang diberikan izin kondisinya tidak dapat ditanami
2	Pendapatan/ kesejahteraan pekebun masih rendah	1. Harga komoditi perkebunan fluktuatif dan belum memberikan keuntungan yang wajar bagi pekebun	1. Kurangnya baiknya penanganan panen, pascapanen dan pengolahan hasil komoditas perkebunan
			2. Mutu produk yang masih rendah
			3. Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan pekebun dalam aspek panen, pasca panen dan pengolahan hasil
			4. Masih rendahnya kesadaran pekebun untuk berperan aktif dalam penguatan kelembagaan kemitraan, pengolahan hasil dan pemaasaran produk
			5. Masih tingginya ketergantungan penjualan hasil pada pengepul (masih kurangnya akses kemitraan pemasaran komoditi perkebunan)
			6. Masih kurangnya ketersediaan sarana penanganan pasca panen dan pengolahan hasil
			7. Belum berkembangnya dengan baik industri hilir pengolahan lada
		2. Skala usahayang masih rendah	Keterbatasan modal pekebun untuk kepemilikanlahan yang lebih luas

2.3.2. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara

Beberapa peluang yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara pada Tahun 2025 yang merupakan Tahun keempat periode Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026, antara lain :

1. Tersedianya kompetensi tenaga kerja
2. Tingginya minat masyarakat terhadap komoditi perkebunan
3. Kondusifnya iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk perkebunan
4. Kemajuan teknologi pengolahan produk perkebunan
5. Selarasnya kebijakan antara pusat dan daerah di bidang perkebunan

2.3.3. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara

Beberapa tantangan yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara pada Tahun 2025 yang merupakan Tahun kedua periode Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026, antara lain :

a. Persaingan kualitas produk perkebunan
b. Kondisi infrastruktur kurang menunjang
c. Implementasi tata ruang secara nasional belum terintegrasi, sehingga menimbulkan tumpang tindih peruntukan lahan
d. Perubahan cuaca/iklim sebagai imbas dari *global warning*
e. Aksesibilitas ke kawasan perkebunan masih terbatas

2.3.4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun yang direncanakan

Dari isu-isu penting yang dihadapi oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara maka dirumuskanlah beberapa program dan kegiatan prioritas pada Tahun 2025, perumusan program dan kegiatan ini juga guna mendukung tema yang telah ditentukan dalam RKPD Kabupaten Kartanegara Tahun 2025 yaitu : “Pemantapan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Akselerasi dan Transformasi Pembangunan”.

Adapun Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah :

Sasaran	Indikator	Data Awal	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Prognosis 2024
Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,08	2,95	1,86	3,60	3,50

Sedangkan Sasaran, Prioritas, Arah Kebijakan Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah :

Sasaran	Prioritas 2025	Arah Kebijakan Pembangunan 2025	Program Prioritas Pembangunan 2025
Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
			Program Perizinan Usaha Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rancangan RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Perkebunan, dikaitkan dengan Visi dan Misi Rancangan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Dimana visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah : “MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”. Dari visi Rancangan

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 tersebut, sektor perkebunan akan memainkan peran yang penting, secara langsung akan mengemban amanah dalam mensukseskan Misi ke 3, yaitu : "Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif".

Proyek strategis pembangunan daerah merupakan proyek yang dapat mendukung visi, misi dan program kepala daerah terpilih, setiap proyek strategis daerah dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan

sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing OPD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui “Program Dedikasi KUKAR IDAMAN” dengan proyek strategis pembangunan daerah bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yaitu Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan pada Kawasan Unggulan Komoditas Perkebunan berupa komoditi Kelapa Sawit, Karet Lada dan Kelapa Dalam, kemudian Kawasan Andalan Komoditas Perkebunan berupa komoditi Kopi, Kakao dan Aren, serta Kawasan Potensial Komoditas Perkebunan berupa komoditi Kelor, Pembangunan 20 Unit Embung, Pembangunan 20.000 Meter Jalan Produksi Perkebunan, Pembinaan 150 Orang Pekebun Milenial Unggul, dan Pembentukan 9 Lembaga Badan Usaha Milik Petani.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan Dinas Perkebunan terhadap Rancangan Akhir RKPD dalam rangka mendukung “Program Dedikasi KUKAR IDAMAN”, maka pada Tahun 2025 akan dilaksanakan sub kegiatan yaitu :

1. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, dengan target 140 Ha Luas pengadaan bibit dan herbisida, 40 Ha Luas pengadaan pupuk, 40 Paket Jumlah pengadaan alat panen dan pasca panen dan 64 Orang Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapatkan Bantuan.
2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian, dengan target pembangunan 2 Unit Embung Perkebunan.
3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, dengan target pembangunan 8 Unit Jalan Produksi Perkebunan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Akhir RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kutai KartanegaraTahun 2025 dibawah ini :

Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,00	31.128.457.862	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,00	30.958.057.862	
3.27.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah*	*9 Dokumen*	*640.274.000*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah*	*6 Dokumen*	*510.500.000*	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam danluar daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	320.898.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam danluar daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	293.500.000	Menyesuaikan kebutuhan

3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	84.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	66.000.000	Menyesuaikan kebutuhan
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	235.376.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	151.000.000	Menyesuaikan kebutuhan
3.27.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel*	*15 Laporan*	*25.339.673.862*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel*	*12 Laporan*	*25.339.673.862*	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perkebunan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.464 Orang/bulan	25.111.553.862	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perkebunan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.352 Orang/bulan	25.111.553.862	

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	228.120.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	12 Laporan	228.120.000	
3.27.01.2.03	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*		*Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*131.660.000*	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*		*Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*283.220.000*	
3.27.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perkebunan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perkebunan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	150.000.000	Sub kegiatan baru
3.27.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan	1 Laporan	81.660.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan	1 Laporan	83.220.000	Tambahan pagu

	Milik Daerah pada SKPD		Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Milik Daerah pada SKPD		Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
3.27.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000	
3.27.01.2.04	*Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*		*Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*25.000.000*	*Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*		*Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*25.000.000*	
3.27.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	25.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	25.000.000	
3.27.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian*	*2 Dokumen*	*537.000.000*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian*	*2 Dokumen*	*587.000.000*	
3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perkebunan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	267 Paket	267.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perkebunan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	267 Paket	267.000.000	

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam dan luar daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	200.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam dan luar daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	250.000.000	Tambahan peserta
3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perkebunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	70.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perkebunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	70.000.000	
3.27.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*7 Layanan*	*1.256.600.000*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*5 Layanan*	*869.814.000*	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera	Dinas Perkebunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	7 Paket	12.100.000						Pengadaan digabung

	ngan Bangunan Kantor		n Bangunan Kantor yang Disediakan								
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perkebunan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	385.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perkebunan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 paket	150.000.000	Belanja dialihkan
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perkebunan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perkebunan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 Paket	55.000.000	Tambahan pagu
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perkebunan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	70.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perkebunan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	70.000.000	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perkebunan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	5.400 Eksemplar	54.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Sub keg tidak dilaksanakan
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	610.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375 Laporan	429.814.000	Menyesuaikan kebutuhan

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perkebunan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perkebunan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	165.000.000	Tambah anpagu
3.27.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah*	*1 Persen*	*500.000.000*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*1 Persen*	*835.000.000*	
3.27.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perkebunan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Diadakan	1 Unit	500.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perkebunan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Diadakan	2 unit	600.000.000	Pengadaan Kendaran &Sewa Kendaraan
3.27.01.2.07.06						Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya	Dinas Perkebunan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnyayang Disediakan	8 Unit	235.000.000	Sub keg baru

3.27.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahyang disediakan*	*12 Bulan*	*1.998.250.000*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahyang disediakan*	*12 Bulan*	*1.807.850.000*	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrikyang Disediakan	12 Laporan	385.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrikyang Disediakan	12 Laporan	370.000.000	
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	12 Laporan	95.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	12 Laporan	90.000.000	Menyesuaikan kebutuhan
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan	12 Laporan	1.518.250.000	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan	12 Laporan	1.347.850.000	Pagu pamera n dialihk an

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.01.2.09	*Pemeliharaan BarangMilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Jumlah Barang MilikDaerah*	*130 Unit*	*700.000.000*	*Pemeliharaan BarangMilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Jumlah Barang MilikDaerah*	*56 Unit*	*700.000.000*	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perkebunan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	127 Unit	400.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perkebunan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	400.000.000	
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perkebunan	Jumlah Gedung Kantordan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perkebunan	Jumlah Gedung Kantordan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	300.000.000	
3.27.02	Penyediaan		1. Luas Areal	28.795	2.154.050.0	Penyediaan		1. Luas Areal	28.795	2.029.050.0	

	Dan Pengembangan Sarana Pertanian		Kelapa Sawit Rakyat (Ha)		00	Dan Pengembangan Sarana Pertanian		Kelapa Sawit Rakyat (Ha)		00	
			2. Luas Areal Kelapa Sawit PBS (Ha)	307.390				2. Luas Areal Kelapa Sawit PBS (Ha)	307.390		
			3. Luas Areal Karet (Ha)	17.988				3. Luas Areal Karet (Ha)	17.988		
			4. Luas Areal Lada (Ha)	3.442				4. Luas Areal Lada (Ha)	3.442		
			5. Luas Areal Kelapa Dalam (Ha)	7.306				5. Luas Areal Kelapa Dalam (Ha)	7.306		
			6. Luas Areal Kopi (Ha)	115				6. Luas Areal Kopi (Ha)	115		
			7. Luas Areal Kakao (Ha)	95				7. Luas Areal Kakao (Ha)	95		
			8. Luas Areal Aren (Ha)	248				8. Luas Areal Aren (Ha)	248		
			9. Luas Areal Kelor (Ha)	9				9. Luas Areal Kelor (Ha)	9		
3.27.02.2.01	*Pengawasan Penggunaan SaranaPertanian*		*Jumlah Sarana Pendukung PertanianYang Diawasi*	*152 Paket*	*1.904.050.000*	*Pengawasan Penggunaan SaranaPertanian*		*Jumlah Sarana Pendukung PertanianYang Diawasi*	*154 Paket*	*1.904.050.000*	

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	*6 Laporan*	*1.904.050.000*	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	*6 Laporan*	*1.904.050.000*	
			Luas pengadaan bibit& herbisida	*10 Ha*	176.500.000		*Tenggarong dan MuaraBadak*	*Luas pengadaan bibit& herbisida*	*10 Ha*	176.500.000	
			Luas pengadaan pupuk	*52 Ha*	251.500.000		*Anggana, Kenohan, Marang Kayu, Kota Bangun Darat*	*Luas pengadaan pupuk*	*52 Ha*	251.500.000	
			Jumlah pengadaan alat panen dan pasca panen	*26 Paket*	79.300.000		*Muara Kaman dan LoaKulu*	*Jumlah pengadaan alat panen dan pasca panen*	*26 Paket*	79.300.000	
			Jumlah Pekebun Miskin Yang	*64 Orang*	800.000.000		*Muara Badak dan KotaBangun*	*Jumlah Pekebun*	*64 Orang*	800.000.000	

			Mendapatkan Bantuan					*Miskin Yang Mendapat kan Bantuan*			
			Luas pengembangan/p emeliharaan Kebun Dinas	*17 Ha*	100.000.000		*Tenggarong, Loa Kulu,Kembang Janggut*	*Luas pengembangan/ pem eliharaan Kebun Dinas*	*17 Ha*	100.000.0 00	
			Jumlah pengadaan benih	*5.000 Buah*	396.750.000		*Kembang Janggut*	*Jumlah pengadaan benih*	*15.000 Buah*	496.750.0 00	Tambahan pagu
			Luas Demfarm Tanaman Perkebunan	*3 Ha*	100.000.000						Dilaksana kanTahun berikutny a
3.27.02.2.01	*Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota*		*Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota*	*1 Komoditi*	*250.000.000*	*Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Ko ta*		*Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan,dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota*	*1 Komoditi*	*125.000.0 00*	
3.27.02.2.02.0 1	Penjaminan Kemurniandan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	18 Kecamata n	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yangDilakukan Pelestarian dan Pemurnian	1 Dokumen	125.000.000	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/	18 Kecamatan	Jumlah SDG Hewan/Tana manyang Dilakukan Pelestarian			Belum dapat dilaksnaak an,

						Tanaman		dan Pemurnian			
3.27.02.2.01.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	18 Kecamatan	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	125.000.000	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	18 Kecamatan	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	125.000.000	

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.03	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		1. Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	4.000 Meter	2.625.000.000	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		1. Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	1.500 Meter	2.800.000.000	
			2. Jumlah Embung Yang Dibangun	5 Unit				2. Jumlah Embung Yang Dibangun	2 Unit		
3.27.03.2.01	*Pengembangan Prasarana Pertanian*		*Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan*	*1 Dokumen*	*150.000.000*	*Pengembangan Prasarana Pertanian*		*Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan*	*1 Dokumen*	*100.000.000*	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	18 Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	150.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kembang Janggut, Muara Badak, Marang Kayu	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	100.000.000	Menyesuaikan kebutuhan

3.27.03.2.02	*Pembangunan Prasarana Pertanian*		*Jumlah Prasarana PertanianYang Dibangun*	*20 Unit*	*2.475.000.000*	*Pembangunan Prasarana Pertanian*		*Jumlah Prasarana PertanianYang Dibangun*	*9 Unit*	*2.700.000.000*	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan JaringanIrigasi Usaha Tani		Jumlah Jaringan IrigasiUsaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	2 Unit	100.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan JaringanIrigasi Usaha Tani	Samboja, MuaraJawa	Jumlah Jaringan IrigasiUsaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	1 Unit	100.000.000	
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian		Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	1.000.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Sebulu, Muara Badak	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasidan Dipelihara	2 Unit	1.000.000.000	Tambah anpagu
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan JalanUsaha Tani		Jumlah Jalan UsahaTani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	8 Unit	1.200.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan JalanUsaha Tani	Loa Kulu, M. Badak, M. Kayu, Tenggarong	Jumlah Jalan UsahaTani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	1.300.000.000	
3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air		Jumlah Pintu Air yangDibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	75.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Samboja, MuaraJawa	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasidan Dipelihara	2 Unit	75.000.000	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnyayang	1 Unit	100.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana	Muara Kaman	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yangDibangun, Direhabilitasidan	1 Unit	225.000.000	Tambah anpagu

	Pertanian Lainnya		Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			Pertanian Lainnya		Dipelihara			

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.05	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan	38,67%	450.000.000	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan	38,67%	400.000.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota		*Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan*	*260 Ha*	*450.000.000*	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota		*Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan*	*260 Ha*	*400.000.000*	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	18 Kecamatan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	130 Ha	150.000.000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	18 Kecamatan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	130 Ha	200.000.000	Tambahan pagu

3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	18 Kecamatan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	23.800 Ha	150.000.000	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	18 Kecamatan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	23.800 Ha	100.000.000	Menyesuaikan kebutuhan
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	18 Kecamatan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100 Ha	150.000.000	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	18 Kecamatan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100 Ha	100.000.000	Menyesuaikan kebutuhan
3.27.06	Perizinan Usaha Pertanian		*1) Jumlah Penerbitan STDB*	200 Surat (STDB)	250.000.000	Perizinan Usaha Pertanian		*1) Jumlah Penerbitan STDB*	200 Surat (STDB)	450.000.000	
			2) Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	10 Surat (PUP)				*2) Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)*	10 Surat (PUP)		
3.27.06.2.01	*Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah*		*Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang*	*210 Pelaku*	*250.000.000*	*Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam*		*Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang*	*210 Pelaku*	*450.000.000*	

	Kabupaten/Kota		*Dibina*			*Daerah Kabupaten/Kota*		*Dibina*			

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	18 Kecamatan	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	2 Laporan	250.000.000						
3.27.06.2.01.05						Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	18 Kecamatan	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	2 Laporan	450.000.000	Tambahan pagu
3.27.07	Penyuluhan Pertanian		Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	*19,62%*	650.000.000	Penyuluhan Pertanian		Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	*19,62 %*	620.400.000	
3.27.07.2.01	*Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian*		*Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial yang dibina*	*49 Lembaga*	*650.000.000*	*Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian*		*Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial yang dibina*	*47 Lembaga*	*620.400.000*	

3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	18 Kecamatan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	47 Unit	400.000.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	18 Kecamatan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	47 Unit	300.000.000	Menyesuaikan kebutuhan
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani		Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	2 Unit	150.000.000						
3.27.07.2.01.09						Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	18 Kecamatan	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1 Dokumen	320.400.000	Tambahan pagu
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah Pekebun Peserta Pelatihan Budidaya, Panen/Pasca Panen	40 Orang	100.000.000						Belum dapat dilaksanakan
Total					37.257.507.862					37.257.507.862	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Perkebunan Kabupaten KutaiKartanegara dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Perkebunan dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 didasarkan kepada Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalampencapaian sasara dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra dapat disinkronkan.

Program dan kegiatan yang disusun untuk Tahun 2025 disamping hasil survey ke lapangan, juga menerima masukan dan usulan dari kelompok masyarakat berupa proposal melalui Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Adapun Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 dibawah ini :

Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
		Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Kelompok Tani				
A	Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)							
I.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				Jumlah Sarana Pendukung PertanianYang Diawasi	20 Paket	1.950.000.000	
1	*Pendampingan PenggunaanSarana Pendukung Pertanian*				*Luas pengadaan bibit & herbisida*	*140 Ha*	*1.400.000.000*	
	1 Pengembangan Sawit Rakyat	Muara Kaman	Sabintulung			10 Ha	100.000.000	Musrenbang
	2 Pengembangan Sawit Rakyat	Muara Wis	Sebemban			10 Ha	100.000.000	Musrenbang
	3 Pengembangan Sawit Rakyat	Muara Wis	Sebemban			10 Ha	100.000.000	Musrenbang
	4 Pengembangan Sawit Rakyat	Muara Wis	Sebemban			10 Ha	100.000.000	Musrenbang
	5 Pengembangan Sawit Rakyat	Muara Wis	Sebemban			10 Ha	100.000.000	Musrenbang
	6 Pengembangan Sawit Rakyat	Muara Wis	Sebemban			10 Ha	100.000.000	Musrenbang
	7 Pengembangan Sawit Rakyat	Kembang Janggut	Hambau			10 Ha	100.000.000	Musrenbang
	8 Pengembangan Sawit Rakyat	Kembang Janggut	Hambau			10 Ha	100.000.000	Musrenbang
	9 Pengembangan Sawit Rakyat	Kembang Janggut	Kembang Janggut			10 Ha	100.000.000	Musrenbang
	10 Pengembangan Sawit Rakyat	Kembang Janggut	Kembang Janggut			10 Ha	100.000.000	Musrenbang
	11 Pengembangan Sawit Rakyat	Kembang Janggut	Pulau Pinang			10 Ha	100.000.000	Musrenbang
	12 Pengembangan Sawit Rakyat	Kembang Janggut	Pulau Pinang			10 Ha	100.000.000	Musrenbang
	13 Pengembangan Sawit Rakyat	Kembang Janggut	Genting Tanah			10 Ha		Musrenbang
	14 Pengembangan Sawit Rakyat	Kembang Janggut	Genting Tanah			10 Ha	100.000.000	Musrenbang
					Luas pengadaan pupuk	*100 Ha*	*500.000.000*	
	1 Intensifikasi Tanaman Sawit	Muara Jawa	Muara Kembang			20 Ha	100.000.000	Musrenbang
	2 Intensifikasi Tanaman Sawit	Muara Jawa	Muara Kembang			20 Ha	100.000.000	Musrenbang
	3 Intensifikasi Tanaman Sawit	Muara Jawa	Muara Kembang			20 Ha	100.000.000	Musrenbang

	4 Intensifikasi Tanaman Sawit	Muara Jawa	Muara Jawa Ilir			20 Ha	100.000.000	Musrenbang
	5 Intensifikasi Tanaman Sawit	Marang Kayu	Santan Tengah			20 Ha	100.000.000	Musrenbang
					Jumlah pengadaan alat panen dan pasca panen	*1 Paket*	*50.000.000*	Musrenbang
	1 Pengadaan alat panen dan pasca panen	Kembang Janggut	Hambau			1 Paket	50.000.000	Musrenbang

No	Sub Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
		Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Kelompok Tani				
II.	Pembangunan Prasarana Pertanian				Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	10 Unit	3.500.000.000	
1	*Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian*				*Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	*1 Unit*	*1.000.000.000*	
	1 Pembangunan Embung Perkebunan	Marang Kayu	Makarti			1 unit	500.000.000	Musrenbang
	2 Pembangunan Embung Perkebunan	Marang Kayu	Makarti			1 unit	500.000.000	Musrenbang
2	*Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani*				*Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	*5 Unit*	*2.500.000.000*	
	1 Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Kembang Janggut	Hambau			1 unit	500.000.000	Musrenbang
	2 Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Marang Kayu	Santan Tengah			1 unit	500.000.000	Musrenbang

	3 Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Marang Kayu	Semangko			1 unit	500.000.000	Musrenbang
	4 Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Marang Kayu	Makarti			1 unit	500.000.000	Musrenbang
	5 Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Muara Muntai	Muara Leka			1 unit	500.000.000	Musrenbang
Total Usulan Masyarakat							5.450.000.000	

No	Sub Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
		Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Kelompok Tani				
B	Hasil Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara							
I.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi	20 Paket	1.700.000.000	
1	*Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*				*Luas pengadaan bibit & herbisida*	*140 Ha*	*1.400.000.000*	
	1 Pengembangan Sawit Rakyat	Muara Badak	Badak Mekar			16 Ha	200.000.000	Pokir Munabbihuddin , SH. MH
	2 Pengembangan Sawit Rakyat	Muara Kaman	Muara Siran	Sepinggan Harapan		16 Ha	200.000.000	Pokir KAMARUR ZAMAN
	3 Pengembangan Sawit Rakyat	Muara Kaman	Menamang Kiri	Lembak		16 Ha	200.000.000	Pokir KAMARUR ZAMAN
	4 Pengembangan Sawit Rakyat	Kembang Janggut	Muai			16 Ha	200.000.000	Pokir SRI MURYANI

	5 Pengembangan Sawit Rakyat	Kenohan	Kahala ilir			16 Ha	200.000.000	Pokir SRI MURYANI
	6 Pengembangan Sawit Rakyat	Muara Kaman	Sedulang			16 Ha	200.000.000	Pokir Rusmono
	7 Pengembangan Sawit Rakyat	Muara Kaman	Sedulang			16 Ha	200.000.000	Pokir Qurais Ismail
					Luas pengadaan pupuk	*100 Ha*	*300.000.000*	
	1 Intensifikasi Tanaman Sawit	Kembang Janggut	Long Bleh Harapan			40 Ha	200.000.000	Pokir SRI MURYANI
	2 Intensifikasi Tanaman Sawit	Muara Kaman	Sedulang			20 Ha	100.000.000	Pokir Rusmono
II.	Pembangunan Prasarana Pertanian				Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	10 Unit	500.000.000	
1	*Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian*				*Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	*1 Unit*	*500.000.000*	
	1 Pembangunan Embung Perkebunan	Muara Badak	Badak Mekar			1 unit	500.000.000	Pokir Munabbihuddin, SH. MH
Total Pokir							2.200.000.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan lingkup dipersempit dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, yang harus selaras dan sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Hal ini berarti bahwa konteks Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkebunan tidak boleh keluar dari koridor Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Visi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah :

"Perkebunan Indonesia Yang Produktif, Bernilai Tambah Dan Berdaya Saing Dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Untuk Mendukung Tercapainya Visi Presiden Republik Indonesia".

Visi Direktorat Jenderal Perkebunan diatas pada dasarnya adalah mewujudkan perkebunan Indonesia yang memenuhi 3 (tiga) kata kondisi utama, yaitu produktif, bernilai tambah dan berdaya saing. Makna ketiga kondisi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Produktif, berarti bahwa produksi komoditas perkebunan Indonesia semakin meningkat dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun dalam memenuhi kebutuhan ekspor. Peningkatan produksi tentunya dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas maupun luas panen tanaman perkebunan nasional.
2. Bernilai tambah berarti bahwa produk perkebunan Indonesia mampu dihilirisasi, tidak menjual bahan mentah, dan mampu menyajikan produk olahan perkebunan yang mampu meningkatkan harga jual komoditas perkebunan nasional. Peningkatan harga jual ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar perkebunan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan pekebun nasional.
3. Berdaya saing berarti bahwa produk perkebunan nasional mampu bersaing dengan produk impor sejenis maupun produk ekspor sejenis dari negara lain. Dalam konteks impor, jika produk perkebunan nasional berdaya saing, maka jumlah impor produk

perkebunan dapat diturunkan baik melalui produk sejenis maupun produk substitut sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sedangkan dalam konteks ekspor, berdaya saing berarti bahwa produk perkebunan nasional menjadi pilihan utama negara tujuan disbanding dengan produk perkebunan sejenis yang dimilikinegara lain.

Misi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024 berdasarkan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah : "Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Asal Perkebunan Serta Kebutuhan Ekspor Komoditas Perkebunan Dalam Memperkuat Stuktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, Dan Berdaya Saing".

Misi ini menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan akan fokus dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri serta pemenuhan kebutuhan ekspor luar negeri, dimana Direktorat Jenderal Perkebunan menjadi tulang punggung dalam meningkatkan ekspor pertanian secara keseluruhan. Hal ini dilakukan guna memperkuat struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing sesuai Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Tujuan merupakan penjabaran lebih detil dari visi dan misi Direktorat Jenderal Perkebunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai Visi Direktorat Jenderal Tahun 2024. Tujuan Direktorat Jenderal perkebunan Tahun 2024 adalah "Terwujudnya Produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing sesuai kepentingan penguatan ekonomi nasional". Tujuan ini diiukur melalui 3 (tiga) indikator tujuan, yaitu :

1. Pertumbuhan ekspor produk perkebunan nasional (%)
2. Penurunan impor produk perkebunan nasional (%)
3. Nilai reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan menuju birokrasi yang efektif dan efsien Sasaran program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output). Perumusan sasaran program Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan penerjemahan dari tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan dan pendelegasian dari Kementerian Pertanian. Selain itu, sasaran program Direktorat Jenderal Perkebunan juga

merupakan hasil pendelegasian kinerja dari sasaran strategis Kementerian Pertanian, sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Direktorat Jenderal Perkebunan. Sasaran program Direktorat Jenderal Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan;
2. Tersedianya sarana perkebunan yang sesuai kebutuhan;
3. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman perkebunan;
4. Terselenggaranya birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efsien;
5. Terselenggaranya pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas;
6. Meningkatnya kualitas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan.

Direktorat Jenderal Perkebunan berupaya untuk mencapai 2 (dua) hasil akhir sebagai bagian kontribusi atas pembangunan pertanian nasional, yaitu pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan yang semakin meningkat serta ekspor produk perkebunan yang semakin meningkat. Kedua hal tersebut akan terwujud apabila produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing dapat terwujud sesuai dengan kepentingan penguatan ekonomi nasional. Terwujudnya atap strategi berupa produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing tersebut tidak lepas dari peran penting keempat pilar strategis Direktorat Jenderal Perkebunan yang salinbersinergi dan terintegrasi.

Pilar pertama adalah perbenihan tanaman perkebunan, dimana diharapkan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dapat terwujud. Ketersediaan dan kualitas benih yang memadai akan sangat mempengaruhi produksi tanaman perkebunan. Pilar kedua adalah budidaya tanaman perkebunan, dimana efsiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan best practice budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan Good Agricultural Practice (GAP).

Pilar ketiga adalah pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), dimana perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/DPI secara optimal dapat dilakukan guna menurunkan risiko gagal panen karena kematian tanaman akibat OPT/DPI tersebut.

Pilar keempat adalah jaminan mutu, dimana peningkatan mutu, keamanan serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan menjadi hal penting yang harus diwujudkan. Hilirisasi produk perkebunan melalui pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta penjaminan mutu dan keamanan pengelolaan perkebunan nasional terintegrasi akan mampu mewujudkan produk perkebunan yang bernilai tambah tinggisehingga mampu bersaing dengan produk perkebunan dari negara lain.

Berdasarkan arahan strategis Direktur Jenderal Perkebunan dan hasil focus group discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan, maka dirumuskan sejumlah kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024. Kegiatan merupakan upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mendukung Kementerian Pertanian dalam mencapai visi dan misi Presiden pada sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan, dimana kegiatan yang disusun harus selaras dengan arah kebiakan dan strategi Kementerian Pertanian. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024 :

1. Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalammendukung produktivitas tanaman.
2. Efsiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan.
3. Efsiensi budidaya dan produksi tanaman Tahunan dan penyegar dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan.
4. Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT serta antisipasi risiko DPI.
5. Peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran produk hasilperkebunan

6. Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai roadmap reformasi birokrasiKementerian Pertanian.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dapat dirumuskan sebagai gambaran tentang keadaan yang diinginkan atau dicita-citakan oleh Dinas Perkebunan selama kurun waktu satu Tahun ke depanberdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan Dinas Perkebunan merupakan sebuah upaya dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara seperti yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.Dimana dalam penetapan tujuan Dinas Perkebunan telah memperhatikan dan mengacu pada Misi (3) Memperkuat Pembangunan Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan tujuan di RPJMD meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan dan di turunkan menjadi Tujuan Dinas Perkebunan yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan dengan indikator tujuanPertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan dengan target di Tahun 2025 sebesar 3,80 Persen. Tujuan Renja ini ditetapkan untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada masa mendatang.

Setelah menetapkan Tujuan maka perlu menetapkan Sasaran. Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perkebunan setiap Tahunnya sesuai dengan penjabaran dari tujuan Renja. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan. Dimana sasaran bersifat spesifik, terukur baik kualitatif maupun kuantitatif sehingga diharapkan dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Dari

tujuan Renja Dinas Perkebunan, dapat dirumuskan turunan tujuan berupa sasaran-sasaran perencanaan pembangunan perkebunan yang efektif dan efisien serta memiliki indikator

yang spesifik, jelas, dan terukur sebagai bahan evaluasi, monitoring, dan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Dalam perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai

tugas dan fungsi dari Dinas Perkebunan. Agar bisa mendapatkan hasil nyata dan lebih spesifik, dan terukur dalam waktu Tahunan maka sasaran Dinas Perkebunan yang ditetapkan yaitu :(1) Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan;(2) Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan;(3) Meningkatnya Kesejahteraan pekebun.

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2025 sebagai pendukung pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan Dan Sasaran Tahun 2025
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan		Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	Persen	3.80
		1. Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Kelapa SawitRakyat	Ton	294.694
			2 Produksi Kelapa SawitPBS	Ton	3.395.024
			3 Produksi Karet	Ton	10.488
			4 Produksi Lada	Ton	2.437
			5 Produksi Kelapa Dalam	Ton	3.206
			6 Produksi Kopi	Ton	40
			7 Produksi Kakao	Ton	66
			8 Produksi Aren	Ton	584
			9 Produksi Kelor	Ton	13
		2. Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan	Produktivitas Kelapa Sawit Rakyat	Kg/Ha	15.327
			2 Produktivitas KelapaSawit PBS	Kg/Ha	18.580
			3 Produktivitas Karet	Kg/Ha	1.059
			4 Produktivitas Lada	Kg/Ha	845
			5 Produktivitas KelapaDalam	Kg/Ha	552
			6 Produktivitas Kopi	Kg/Ha	617
			7 Produktivitas Kakao	Kg/Ha	806
			8 Produktivitas Aren	Kg/Ha	3.637
			9 Produktivitas Kelor	Kg/Ha	1.471
		3. Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun	NTP Perkebunan	Persen	104.00

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran Tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026. Pada dasarnya Rencana Kerja Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2025. Target kinerja mereprensentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran Tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya. Didalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ada beberapa program dan kegiatan yang menjadi prioritas, yaitu Program Kegiatan Prioritas membangun Jalan Produksi Perkebunan sepanjang 7.500 Meter dan Pembangunan Embung kecil sebanyak 4 unit yang mana keduanya merupakan Program Dedikasi Kukar Idaman. Selain itu ada juga beberapa program dan kegiatan yang dianggap penting diantaranya program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian yang merupakan salah satu program pendukung Pembangunan Kawasan Sentra Pertanian dan menjadi program pendukung capain target sasaran meningkatnya produksi komoditas perkebunan , Program pendukung capaian target sasaran meningkatnya produktivitas komoditas perkebunan yaitu program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian dan Program Perizinan Usaha Pertanian, serta program pendukung capain target sasaran meningkatnya kesejahteraan perkebunan yaitu Penyuluhan Pertanian.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra), Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026 merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah

ditentukan dalam Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik dinas sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat. Secara garis besar, belanja pemerintah daerah yang dialokasikan melalui Dinas Perkebunan adalah sebagai berikut :

Kode	Program	Anggaran
3.27.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	25.341.714.906
3.27.02	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	*6.359.050.000*
3.27.03	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	9.800.000.000
3.27.05	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	400.000.000
3.27.06	Perizinan Usaha Pertanian	450.000.000
3.27.07	Penyuluhan Pertanian	*620.400.000*
TOTAL		42.971.164.906

Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2025 direncanakan berjumlah 6 Program, 16 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp.42.971.164.906,-

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Tahun 2025, secara rinci dapat dilihat pada Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah ini :

Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Kutai Kartanegara Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	KebutuhanDana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP PerangkatDaerah		79,00	25.341.714.906	79,50	30.868.927.862
3.27.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*9 Dokumen*	*1.000.000.000*	*6 Dokumen*	*600.000.000*
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan luardaerah	3 Dokumen	450.000.000	3 Dokumen	250.000.000
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perkebunan	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	Dalam dan luardaerah	1 Laporan	150.000.000		
3.27.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata PendukungStatistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan WalidataPendukung Statistik Sektoral Daerah	Dalam dan luardaerah	1 Dokumen	50.000.000		

3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan danDiperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Dalam dan luardaerah	1 Data	250.000.000	1 Data	250.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	KebutuhanDana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan BidangUrusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan luar daerah	1 Berita Acara	50.000.000	1 Berita Acara	50.000.000
3.27.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yangakuntabel*		*14 Laporan*	*19.462.050.906*	*12 Laporan*	*25.991.263.862*
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perkebunan	2.352 Orang / bulan	19.183.930.906	2.464 Orang / bulan	25.738.143.862
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perkebunan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	Dinas Perkebunan	12 Laporan	228.120.000	12 Laporan	228.120.000

		Semesteran SKPD					
3.27.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Perkebunan	1 Dokumen	25.000.000		
3.27.01.2.03	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah(BMD) pada Perangkat Daerah*		*5 Dokumen*	*255.000.000*	*1 Dokumen*	*255.000.000*

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.01.2.03.01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	Dinas Perkebunan	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000
3.27.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan BarangMilik Daerah SKPD	Dinas Perkebunan	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000
3.27.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BarangMilik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perkebunan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000
3.27.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perkebunan	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000
3.27.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kukar	1 Laporan	-	1 Laporan	-

3.27.01.2.04	*Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*		*1 Dokumen*	*10.000.000*	*1 Dokumen*	*10.000.000*
3.27.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perkebunan	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000
3.27.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian*		*3 Dokumen*	*587.000.000*	*2 Dokumen*	*320.000.000*
3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinas Perkebunan	267 Paket	267.000.000	-	-
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dalam dan luar daerah	30 Orang	250.000.000	30 Orang	250.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perkebunan	40 Orang	70.000.000	40 Orang	70.000.000
3.27.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*6 Layanan*	*969.814.000*	*5 Layanan*	*869.814.000*
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Perkebunan	30 paket	150.000.000	30 paket	150.000.000
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Perkebunan	17 Paket	55.000.000	17 Paket	55.000.000

3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Perkebunan	4 paket	70.000.000	4 paket	70.000.000
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan luar daerah	375 Laporan	429.814.000	375 Laporan	429.814.000
3.27.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perkebunan	1 Dokumen	165.000.000	1 Dokumen	165.000.000
3.27.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Perkebunan	1 Dokumen	100.000.000		
3.27.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase Pengadaan Barang MilikDaerah*		*1 Persen*	*650.000.000*	*15 Laporan*	*415.000.000*
3.27.01.2.07.01	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	Dinas Perkebunan	1 unit	315.000.000	-	-
3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Dinas Perkebunan	1 unit	180.000.000	1 unit	180.000.000
	Lapangan	Disediakan					
Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnyayang Disediakan	Dinas Perkebunan	4 Unit	155.000.000	8 Unit	235.000.000
3.27.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah yang disediakan*		*12 Bulan*	*1.707.850.000*	*12 Bulan*	*1.707.850.000*

3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Perkebunan	12 Laporan	370.000.000	12 Laporan	370.000.000
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yangDisediakan	Dinas Perkebunan	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	90.000.000
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Perkebunan	12 Laporan	1.247.850.000	12 Laporan	1.247.850.000
3.27.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Barang Milik Daerah*	Dinas Perkebunan	*56 Unit*	*700.000.000*	*56 Unit*	*700.000.000*
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Perkebunan	53 Unit	400.000.000	53 Unit	400.000.000
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Perkebunan	3 Unit	300.000.000	3 Unit	300.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.02	Penyediaan Dan Pengembangan	1. Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat (Ha)		28.795	*6.359.050.000*	28.880	*2.063.250.000*

	Sarana Pertanian	2. Luas Areal Kelapa Sawit PBS (Ha)		307.390		346.255	
		3. Luas Areal Karet (Ha)		17.988		18.033	
		4. Luas Areal Lada (Ha)		3.442		3.452	
		5. Luas Areal Kelapa Dalam (Ha)		7.306		7.311	
		6. Luas Areal Kopi (Ha)		115		125	
		7. Luas Areal Kakao (Ha)		95		100	
		8. Luas Areal Aren (Ha)		248		253	
		9. Luas Areal Kelor (Ha)		9		9	
3.27.02.2.01	*Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*	*Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi*		*560 Paket*	*6.234.050.000*	*141 Paket*	*1.938.250.000*
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*		*25 Laporan*	*6.234.050.000*	*6 Laporan*	*1.938.250.000*
		Pengadaan bibit & herbisida	*Tenggarong dan Muara Badak*	*10 Ha*	176.500.000	*10 Ha*	176.500.000
			Muara Kaman (Usulan Musrenbang)	*10 Ha*	100.000.000		
			Muara Wis (Usulan Musrenbang)	*50 Ha*	500.000.000		
			Kembang Janggut (Usulan Musrenbang)	*80 Ha*	800.000.000		
		Pengadaan pupuk	*Anggana, Kenohan, Marang Kayu, Kota Bangun Darat*	*52 Ha*	251.500.000	*76 Ha*	358.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

			Muara Jawa (Usulan Musrenbang)	*80 Ha*	400.000.000		
			Marang Kayu (Usulan Musrenbang)	*20 Ha*	100.000.000		
		Jumlah pengadaan alat panendan pasca panen	*Muara Kaman dan Loa Kulu*	*2 Paket*	79.300.000	*8 Paket*	307.000.000
			Kembang Janggut (Usulan Musrenbang)	*1 Paket*	50.000.000		
		Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapatkan Bantuan	*Muara Badak dan Kota Bangun*	*64 Orang*	800.000.000	*45 Ha*	600.000.000
		Pemeliharaan Kebun Dinas	*Tenggarong, Loa Kulu, Kembang Janggut*	*17 Ha*	100.000.000	*17 Ha*	100.000.000
		Jumlah pengadaan benih	*Kembang Janggut*	*15.000 Buah*	496.750.000	*5.000 Buah*	396.750.000
		Penyediaan Bibit Sawit (Pokir)	*Kembang Janggut*	*16 Ha*	220.000.000		
		Penyediaan Bibit Sawit (Pokir)	*Tabang*	*16 Ha*	220.000.000		
		Penyediaan Bibit Sawit (Pokir)	*Kenohan*	*16 Ha*	220.000.000		
		Penyediaan Bibit Sawit (Pokir)	*Kota Bangun Darat*	*18 Ha*	220.000.000		
		Penyediaan Bibit Sawit (Pokir)	*Muara Siran*	*12 Ha*	150.000.000		
		Penyediaan Bibit Sawit (Pokir)	*Menamang Kiri*	*12 Ha*	150.000.000		
		Penyediaan Bibit Sawit (Pokir)	*Badak Mekar*	*17 Ha*	200.000.000		
		Penyediaan Bibit Sawit (Pokir)	*Muara Leka*	*17 Ha*	200.000.000		
		Penyediaan Bibit Sawit (Pokir)	*Lebak Cilong*	*17 Ha*	200.000.000		
		Penyediaan Bibit Sawit (Pokir)	*Kembang Janggut*	*16 Ha*	200.000.000		
		Penyediaan Bibit Sawit (Pokir)	*Kembang Janggut*	*16 Ha*	200.000.000		
		Penyediaan Bibit Sawit (Pokir)	*Kahala Ilir*	*16 Ha*	200.000.000		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.02.2.01	*Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG)Hewan dan Tumbuhan*		*1 Komoditi*	*125.000.000*	*1 Komoditi*	*125.000.000*
3.27.02.2.01.03	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	18 Kecamatan	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000
3.27.03	Penyediaan Dan Pengembangan PrasaranaPertanian	1. Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun		7.500 Meter	9.800.000.000	2.000 Meter	3.157.770.000
		2. Jumlah Embung Yang Dibangun		4 Unit		2 Unit	
3.27.03.2.01	*Pengembangan Prasarana Pertanian*	*Jumlah Prasarana PertanianYang Dikembangkan*		*1 Dokumen*	*100.000.000*	*1 Dokumen*	*100.000.000*
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kembang Janggut, Muara Badak, Marang Kayu	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000
3.27.03.2.02	*Pembangunan Prasarana Pertanian*	*Jumlah Prasarana PertanianYang Dibangun*		*23 Unit*	*9.700.000.000*	*8 Unit*	*3.057.770.000*
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasidan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		4 Unit	2.000.000.000	2 Unit	1.000.000.000
			Sebulu dan Muara Badak	2 Unit	1.000.000.000		
			Marang Kayu (Usulan Musrenbang)	2 Unit	1.000.000.000		
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasidan	Jalan Usaha Tani yang		15 Unit	7.300.000.000	4 Unit	1.732.770.000

	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Loa Kulu, Muara Badak, Marang Kayu	3 Unit	1.300.000.000		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Muara Muntai , Kembang Janggut , Marang Kayu (Usulan Musrenbang)	5 Unit	2.500.000.000		
			Sebuntal, Marang Kayu (Pokir)	1 Unit	500.000.000		
			Kembang Janggut (Pokir)	1 Unit	500.000.000		
			Kembang Janggut (Pokir)	1 Unit	500.000.000		
			Kembang Janggut (Pokir)	1 Unit	500.000.000		
			Kembang Janggut (Pokir)	1 Unit	500.000.000		
			Long Beleh Modang, Kembang Janggut (Pokir)	1 Unit	500.000.000		
			Long Beleh Modang, Kembang Janggut (Pokir)	1 Unit	500.000.000		
3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasidan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan	Samboja, Muara Jawa	2 Unit	75.000.000	-	-

		Dipelihara					
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasidan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Muara Kaman	1 Unit	225.000.000	1 Unit	225.000.000
3.27.03.2.02.00 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Samboja, Muara Jawa	1 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.05	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan		38,67%	400.000.000	20,00%	400.000.000
3.27.05.2.01	*Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota*	*Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan*		*260 Ha*	*400.000.000*	*280 Ha*	*400.000.000*
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	18 Kecamatan	130 Ha	200.000.000	140 Ha	200.000.000
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) TanamanPangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	18 Kecamatan	23.800 Ha	100.000.000	24.200 Ha	100.000.000

	Perkebunan						
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan,dan Gangguan Usaha TanamanPangan, Hortikultura, dan Perkebunan	18 Kecamatan	100 Ha	100.000.000	100 Ha	100.000.000
3.27.06	Perizinan Usaha Pertanian	*1) Jumlah Penerbitan STDB*		200 Surat (STDB)	450,000,000	200 Surat (STDB)	350,000,000
		2) Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)		10 Surat (PUP)		3 Surat (PUP)	
3.27.06.2.01	*Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang Dibina*		*210 Pelaku*	*450.000.000*	*203 Pelaku*	*350.000.000*

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.06.2.01.05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	18 Kecamatan	2 Laporan	450.000.000	2 Laporan	350.000.000
3.27.07	Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani		*19,62%*	620.400.000	*24,60%*	620.400.000

3.27.07.2.01	*Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian*	*Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial yang dibina*		*47 Lembaga*	*620.400.000*	*47 Lembaga*	*620.400.000*
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18 Kecamatan	47 Unit	300.000.000	47 Unit	300.000.000
3.27.07.2.01.09	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomidan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	18 Kecamatan	1 Dokumen	320.400.000	2 Unit	320.400.000
Total					42.971.164.906		37.460.347.862

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini selanjutnya digunakan sebagai landasan operasional dimana isinya lebih memusatkan pada tujuan, sasaran jangka pendek.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 34 Tahun 2021 Tanggal 17 September 2021 OPD Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Perkebunan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara memfunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan di Bidang Perkebunan;
b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perkebunan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perkebunan;
d. Pelaksanaan dministrasi dinas di Bidang Perkebunan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Perkebunan, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tantangan yang berorientasi pada kebijakan program dengan menerapkan konsep Perekonomian Daerah Berbasis pada Sektor Terbarukan guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025ini telah disusun dengan melibatkan hampir seluruh stakeholder yang terkait dengan sub sektor perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga diharapkan pelaksanaan dari seluruh rencana yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara baik oleh semua pihak yang terkait, baik unsur internal yaitu semua

bidang dalam lingkup Dinas, Sekretariat maupun Kelompok Jabatan Fungsional.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten KutaiKartanegara Tahun 2025 ini adalah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dan sebagai bentuk perencanaan pembangunan disusun atas dasar tujuan, sasaran serta kebijakan-kebijakan strategis, hal ini akan digunakan sebagai implementasi kegiatan di lapangan yang diharapkan terjadi kesinergian/keterpaduan dalam langkah dan gerak pelaksanaan tugas dari aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sehubungan hal tersebut maka ditetapkan beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan Renja yang telah disusun sebagai berikut :

1. Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 harus dilaksanakan secara konsisten dan terpadu melalui kerjasama pihak yang berfungsi sebagai manajerial yaitu Sekretariat dan pihak yang mengemban proses utama kegiatan yaitu semua bidang dalam lingkup Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah perencanaanyang bersifat top down dan bottom up planning sehingga dalam pelaksanaannya keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan khususnya pelaku usaha sub sektor perkebunan baik petani, lembaga petani, pengusaha sub sektor perkebunan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
3. Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Tahunan yang didalamnya telah berisi sinkronisasi dan sinergitas dari semua perencanaan yang menjadi dokumen acuan baik RKPD, RPJMD, RPJPD, RPJMN dan RPJPN.
4. Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 akan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun berikutnya.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Implementasi Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan membutuhkan manajemen yang baik dalam pelaksanaanya. Kegiatan manajerial tersebut meliputi pengorganisasian (organizing), Pelaksanaan itu sendiri

(actuating) dan evaluasi (controlling), berdasarkan hal tersebut maka perlu dirumuskan Rencana Tindak Lanjut dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, antara lain :

1. Dalam pelaksanaannya Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 akan dilaksanakan dengan keterlibatan semua elemen dalam Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (internal) dan elemen di luar Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, keterlibatan elemen internal tersebut Sekretariat, Bidang Pengembangan dan Perbenihan, Bidang Produksi, Bidang Usaha dan Penyuluhan, Bidang Perlindungan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat akan melakukan pengorganisasian (organizing) dan Evaluasi (controlling) dalam pelaksanaan dokumen Renja Perubahan yang telah ditetapkan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
3. Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan khususnya pelayanan pada pelaku usaha perkebunan baik petani, lembaga petani (kelompok tani, gabungan kelompok tani) maupun sektor privat yang bergerak pada sub sektor perkebunan.

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

z.RENJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perauran Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, memastikan bahwa proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap Penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Renja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) Tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) Tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima Tahunan kedalam perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 proses Teknokratik, Politik, Partisipatif dan Top Down – Bottom Up dan secara Substansi bersifat Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial serta mengacu pada pendekatan " Money Folllow Program" berbasis tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan serta visi dan Misi Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah :

1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8 Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9 Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

13 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

15 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3 Maksud dan tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan RENJA Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara Tahun Rencana 2025 dimaksudkan sebagai panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara Tahun Rencana 2025.

1.3.2 Tujuan

Sedangakan tujuan disusunnya RENJA Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara Tahun Rencana 2025 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Rencana 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan RENJA Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara Tahun Rencana 2025 meliputi:

BAB I. PENDAHULUAN,

berisi tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU,

berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKKAT DAERAH,

berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran OPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, berisi tentang : Program dan Kegiatan.

BAB V. PENUTUP.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026.

Pelaksanaan evaluasi Renja Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran. Renja kelautan dan perikanan Tahun 2023 memuat 5 Program, 22 Kegiatan dan 71 Sub Kegiatan dengan jumlah pagu Rp500.299.743.472,-. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan dalam renja kelautan dan perikanan 2023 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Keuangan sebesar Rp470,654,646,888,- atau 94,07% SILPA sebesar Rp29.645.096.584,-
b. Realisasi Fisik Kegiatan rata-rata mencapai 97%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun anggaran 2023 cukup baik. Bahwa ketidak cermatan dalam pengalokasian anggaran pada rekening belanja menyebabkan SILPA yang cukup besar, harga SHS pada komponen terlalu besar diatas harga perkiraan, seperti yang terjadi pada rekening Belanja Persediaan Yang Dijual/ Diserahkan Kepada masyarakat, Sisa Lelang dan Silpa beberapa Sub Kegiatan dengan nilai kurang lebih Rp23.244.267.150,- (dua puluh tiga miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh rupiah).

Sisa lelang dari beberapa paket kegiatan juga memberi kontribusi yang besar dari jumlah SILPA pada Dinas Kelautan dan Perikanan seperti paket pada sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dan sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah/Kabupaten/Kota. Selain itu, pada beberapa sub kegiatan juga terdapat sisa anggaran yang tidak mampu direalisasikan 100 %.

Sumber pendanaan program - kegiatan TA.2023 adalah sebagai berikut :

a. APBD Kabupaten Kutai Kartanegara,
b. DAK.

Bahwa hingga Tahun 2023 telah difasilitasi nelayan dan pembudidaya ikan aktif sebanyak kurang lebih 21,200 orang dengan anggaran dari Tahun 2022 – 2023 sebesar Rp478,142,510,130 bahwa pencapaian tersebut dihuitung dari beberapa sub kegiatan yang khusus memfasilitasi nelayan dan pembudidaya aktif dianatarnya :

a. Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap sebesar: 7.865 nelayan denga anggaran sebesar Rp132,240,862,800;
b. Penjaminan ketersediaan sarana usaha pembudidayaan ikan yang dapat diusahakan dalam satu wilayah kab/ kota sebesar : 11,440 pembudidaya dengan realisasi anggaran sebesar Rp279,475,309,360
c. Pengambangan kapasitas nelayan kecil : 2,240 nelayan miskin dengan pemberian sarana penangkapan ikan lengkap menyerap anggaran sebesar Rp64,426,337,970
d. Pengawasan usaha perikanan tangkap sebesar : 400 orang nelayan pelaku ilegal fishing, dengan bentuk kegiatan penggantian alat tangkap ramah lingkungan sistem barter dan sosilisasi dengan anggaran sebesar Rp2,000,000,000

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel TC.29 :

Tabel TC.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Dan Pencapaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara S/D Tahun 2024.

Dinas Kelautan dan Perikanan.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	NON URUSAN (GENERIK)									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
								Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip Perangkat Daerah	86 Angka	84 Angka	85.5 Angka	73.55 Angka	86.02	85.7 Angka	85.7 Angka/Nilai	99.65
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan	25 Doku	11 Doku	3 Doku	3 Doku	100.00	3 Doku	17 Dokumen	68.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja.								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Doku	2 Doku	2 Doku	2 Doku	100.00	3 Doku	7 Dokumen	140.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokume	5 Doku	1 Doku	0 Doku	0 Doku	0.00	0 Doku	1 Dokumen	20.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		n RKA-SKPD.								
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordina	5 Doku	1 Doku	0 Doku	0 Doku	0.00	0 Doku	1 Dokumen	20.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		si Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordina	5 Lapor	1 Lapor	0 Lapor	0 Lapor	0.00	5 Lapor	6 Laporan	120.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		si Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	5 Lapor	1 Lapor	1 Lapor	1 Lapor	100.00	1 Lapor	3 Laporan	60.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Adminsitrasi Keuangan	110 Doku	23 Doku	21 Doku	21 Doku	100.00	21 Doku	65 Dokumen Laporan	59.09

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Perangkat Daerah.								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	600 Orang	120 Orang	120 Orang	99 Orang	82.50	120 Orang	339 Orang	56.50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	15 Lapor	3 Lapor	3 Lapor	3 Lapor	100.00	3 Lapor	9 Laporan	60.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.									
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak	5 Doku	1 Doku	0 Doku	0 Doku	0.00	0 Doku	1 Dokumen	20.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Lanjut Pemeriksaan									
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semester	90 Lapor	18 Lapor	18 Lapor	18 Lapor	100.00	18 Lapor	54 Laporan	60.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwula								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		nan/Semesteran SKPD.								
	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	5 Doku	1 Doku	0 Doku	0 Doku	0.00	1 Doku	2 Dokumen Laporan	40.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Anggaran								
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	30 Doku	6 Doku	1 Doku	1 Doku	100.00	2 Doku	9 Dokumen	30.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Daerah SKPD								
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Doku	1 Doku	1 Doku	1 Doku	100.00	1 Doku	3 Dokumen	60.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	5 Lapor	1 Lapor	0 Lapor	0 Lapor	0.00	1 Lapor	2 Laporan	40.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		pada SKPD.								
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	5 Lapor	1 Lapor	0 Lapor	0 Lapor	0.00	0 Lapor	1 Laporan	20.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Milik Daerah pada SKPD									
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	15 Lapor	3 Lapor	0 Lapor	0 Lapor	0.00	0 Lapor	3 Laporan	20.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		pada SKPD								
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan	5 Doku	1 Doku	1 Doku	1 Doku	100.00	1 Doku	3 Dokumen	60.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Perangkat Daerah.								
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5 Lapor	1 Lapor	1 Lapor	1 Lapor	100.00	1 Lapor	3 Laporan	60.00
	Administrasi Kepegawaia	Jumlah Dokumen Administrasi	10 Doku	2 Doku	2 Doku	2 Doku	100.00	3 Doku	7 Dokumen	70.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	n Perangkat Daerah	Kepegawaian.								
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Doku	1 Doku	0 Doku	0 Doku	0.00	1 Doku	2 Dokumen	40.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian.	5 Doku	1 Doku	1 Doku	1 Doku	100.00	0 Doku	2 Dokumen	40.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Doku	1 Doku	0 Doku	0 Doku	0.00	1 Doku	2 Dokumen	40.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	50 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	100.00	50 Orang	70 Orang	140.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Undangan								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Jumlah ASN Kelautan dan Perikanan Yang Mendapa	550 ASN	110 ASN	110 ASN	110 ASN	100.00	110 ASN	330 ASN	60.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		tkan Layanan								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100.00	1 Paket	3 Paket	60.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		yang Disediakan.								
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100.00	1 Paket	3 Paket	60.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Disediakan								
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100.00	1 Paket	3 Paket	60.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100.00	1 Paket	3 Paket	60.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan.	5 Doku	1 Doku	2184 eksem	2184 eksem	100.00	1 Doku	3 Dokumen	60.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	5 Lapor	- Lapor	1 Lapor	1 Lapor	0.00	1 Lapor	3 Laporan	60.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Lapor	30 Lapor	30 Lapor	30 Lapor	100.00	50 Lapor	110 Laporan	73.33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Doku	1 Doku	1 Doku	1 Doku	100.00	1 Doku	3 Dokumen	60.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang	4 Unit	0 Unit	4 Unit	4 Unit	100	2 Unit	6 Unit	150

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemerintah Daerah	Urusan Daerah Diadakan								
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.	4 Unit	0 Unit	7 Unit	7 Unit	100.00	2 Unit	9 Unit	225.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	6 Unit	6 Unit	100.00	0 Unit	6 Unit	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	6 Unit	6 Unit	100.00	0 Unit	6 Unit	100.00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang	0 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	100.00	0 Unit	2 Unit	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Disediakan								
	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	100.00	1 Unit	3 Unit	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	0 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	100.00	Unit	2 Unit	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Disediakan								
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerint	15 Lapor	3 Lapor	3 Lapor	3 Lapor	100.00	3 Lapor	9 Laporan	60.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		ah Daerah.								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	5 Lapor	1 Lapor	1 Lapor	1 Lapor	100.00	1 Lapor	3 Laporan	60.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Listrik yang Disediakan.								
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Lapor	1 Lapor	1 Lapor	1 Lapor	100.00	1 Lapor	3 Laporan	60.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		yang Disediakan								
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	5 Lapor	1 Lapor	1 Lapor	1 Lapor	100.00	1 Lapor	3 Laporan	60.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Disediakan								
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjnag	90 Perse	90 Perse	90 Perse	90 Perse	100.00	90 Perse	90 Persen	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan.									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	100.00	23 Unit	69 Unit	60.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dipeliharaa dan dibayarkan Pajaknya								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	95 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	100.00	19 Unit	57 Unit	60.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	10 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	100.00	2 Unit	7 Unit	70.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Dipelihara								
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihar	10 Unit	2 Unit	5 Unit	5 Unit	100.00	3 Unit	10 Unit	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		a/Direhabilitasi								
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00	1 Unit	3 Unit	60.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.								
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	1E+0 Ton	80000 Ton	86520 Ton	98397 Ton	113.73	95172 Ton	27356 Ton	237.56

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan	Jumlah Nelayan Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan.	10694 Nelay	1038 Nelay	1870 Nelay	5285 Nelay	282.62	2000 Nelay	8323 Nelayan	77.83

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	35 Doku	7 Doku	2 Doku	2 Doku	100.00	2 Doku	11 Dokumen Data dan Informasi	31.43

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		yang Tersedia.								
	Penyediaan Prasarana Usaha	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan	15 Unit	2 Unit	8 Unit	8 Unit	100.00	6 Unit	16 Unit	106.67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Perikanan Tangkap	Tangkap yang Tersedia.								
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin	12594 Unit	1218 Unit	2220 Unit	8130 Unit	366.22	2300 Unit	11648 Unit	92.49

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		dan Tersedia								
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Terjamin dan Tersedia								
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota.	Jumlah KUB Naik Kelas	40 KUB	1 KUB	8 KUB	3 KUB	37.50	20 KUB	24 KUB	60.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Nelayan Miskin dan Rentan Miskin Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan	2720 Orang	0 Orang	500 Orang	1730 Orang	346.00	2500 Orang	4230 Orang	155.51

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	2720 Orang	0 Orang	768 Orang	1746 Orang	227.34	1500 Orang	3246 Orang	119.34
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembang	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilita	436 KUB	102 KUB	100 KUB	100 KUB	100.00	100 KUB	302 KUB	69.27

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	an Kelembagaan Nelayan Kecil	si Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya.								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan,	400 Unit	50 Unit	100 Unit	100 Unit	0.00	350 Unit	500 Unit Usaha	125.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kemitraan Usaha									
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI Beroperasi	4 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00	2 Unit	3 Unit	75.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Doku	0 Doku	1 Doku	1 Doku	0.00	1 Doku	2 Dokumen	200.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3 Layan	0 Layan	3 Layan	3 Layan	100.00	3 Layan	6 Nelayan	200.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan diterbitkan	7150 TDKP	146 TDKP	1500 TDKP	1000 TDKP	66.67	5000 TDKP	6146 TDKP	85.96

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan	1 Doku	0 Doku	1 Doku	1 Doku	0.00	1 Doku	2 Dokumen	200.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Dengan 10 GT	Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota.								
	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar	7150 Data	146 Data	1500 Data	1500 Data	100.00	5000 Data	6646 Data Rekomendasi	92.95

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Kapal Perikanan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai 10 GT Terdaftar	6500 Kapal	0 Kapal	1500 Kapal	1500 Kapal	0.00	5000 Kapal	6500 Kapal Terdaftar	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi	1 Doku	0 Doku	1 Doku	1 Doku	0.00	0 Doku	1 Dokumen	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kewenangan Kabupaten/Kota.								
	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan	328,083	6500 Kapal	0 Kapal	1500 Kapal	1500 Kapal	0.00	5000 Kapal	6500 Kapal Terdaftar	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Ukuran Sampai Dengan 10 GT									
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	2E+0 Ton	1E+0 Ton	16575 Ton	19112 Ton	115.31	18560 Ton	51369 Ton	220.63
	Pemberdayaan Pembudi	Jumlah POKDAKAN Bermitra	100 POKD	8 POKD	20 POKD	20 POKD	100.00	50 POKD	78 POKDAKAN	78.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Daya Ikan Kecil									
		Jumlah POKDAKAN Naik Kelas	25 POKD	10 POKD	5 POKD	3 POKD	60.00	20 POKD	33 POKDAKAN	132.00
	Pengembangan Kapasitas	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan	75 Kelom	10 Kelom	15 Kelom	18 Kelom	120.00	30 Kelom	58 Kelompok	77.33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pembudidaya Ikan Kecil	Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas.								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengemb	348 Kelom	0 Kelom	100 Kelom	100 Kelom	100.00	100 Kelom	200 Kelompok	57.47

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		angan Kelembagaan.								
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendana	150 Kelom	0 Kelom	30 Kelom	30 Kelom	0.00	100 Kelom	130 Kelompok	86.67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	, Kemitraan Usaha	an, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelengga	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetah	100 Kelom	5 Kelom	46 Kelom	46 Kelom	100.00	30 Kelom	81 Kelompok	81.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	raan Pendidikan dan Pelatihan	uan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah Tanda Daftar Pembudi daya Ikan Diterbitkan	5000 Tanda	0 Tanda	1000 Tanda	212 Tanda	21.20	1000 Tanda	1212 Tanda Daftar	24.24

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi			0	0	0.00	0	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	(satu) daerah kabupaten/ kota	Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan.								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi	5000 Tanda	0 Tanda	1000 Tanda	212 Tanda	21.20	1000 Tanda	1212 Tanda Daftar	24.24

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	kabupaten/ kota	Kewenangan Kabupaten/Kota								
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan Terfasilitasi	8610 Pemb	610 Pemb	1130 Pemb	8848 Pemb	783.01	2078 Pemb	11536 Pembudidaya Ikan	133.98

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan.									
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	35 Doku	7 Doku	1 Doku	1 Doku	100.00	1 Doku	9 Dokumen Data.	25.71

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	135 Unit	0 Unit	35 Unit	35 Unit	100.00	100 Unit	135 Unit	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Kota								
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu)	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	9460 Unit	650 Unit	2520 Unit	13400 Unit	531.75	2500 Unit	16550 Unit	174.95

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Kota								
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu)	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu)	5 Doku	0 Doku	1 Doku	1 Doku	100.00	1 Doku	2 Dokumen	40.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Daerah Kabupaten/ Kota	Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat.	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan	0 Pemb	0 Pemb	0 Pemb	0 Pemb	0.00	0 Pemb	0 Pembudidaya Ikan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Ikan di Darat.								
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan,	5000 Ha	0 Ha	100 Ha	100 Ha	100.00	0 Ha	100 Ha	2.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi.								
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA	CAKUPAN WILAYAH SUMBER DAYA	20 Keca	4 Keca	20 Keca	20 Keca	100.00	20 Keca	44 Kecamatan	220.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERIKANAN YANG DIAWASI								
		PERSENTASE KASUS ILEGAL DAN DESTRUKTIF FISHING	100 Perse	0 Perse	93 Perse	93 Perse	100.00	95 Perse	188 Persen	188.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		YANG DITUNTASKAN.								
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	12 POKM	2 POKM	3 POKM	3 POKM	100.00	5 POKM	10 POKMASWAS	83.33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	yang Difasilitasi								
		Jumlah Reservat Diawasi	3 Reser	3 Reser	3 Reser	3 Reser	100.00	3 Reser	3 Reservat	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Nelayan Mendapatkan Alat Tangkap Ramah Lingkungan	2000 Orang	0 Orang	400 Orang	200 Orang	50.00	500 Orang	700 Orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai,	5 Doku	0 Doku	1 Doku	1 Doku	100.00	1 Doku	2 Dokumen	40.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kabupaten/Kota.								
	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/ kota	dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai,	5 Doku	0 Doku	1 Doku	1 Doku	100.00	1 Doku	2 Dokumen	40.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kabupaten/Kota.								
	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	kewenangan kabupaten/ kota	yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
								Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	27668 Ton	21678 Ton	23900 Ton	60370 Ton	252.59	25095 Ton	10714 Ton	387.25
					Jumlah Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan	1860 Ton	1500 Ton	1607 Ton	1717 Ton	106.85	1687 Ton	4904 Ton	263.66

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan	50 Tanda	2 Tanda	10 Tanda	10 Tanda	100.00	10 Tanda	22 Tanda Daftar	44.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala	5 Doku	0 Doku	1 Doku	1 Doku	100.00	1 Doku	2 Dokumen	40.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kabupaten/ Kota	Usaha dan Risiko.								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Yang Menerapkan Standar Mutu	25 Unit	0 Unit	15 Unit	15 Unit	100.00	15 Unit	30 Unit Usaha	120.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhada	25 Unit	0 Unit	15 Unit	15 Unit	100.00	15 Unit	30 Unit Usaha	120.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Skala Mikro dan Kecil	p Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasar								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		an Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko.								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah POKLAHSAR Difasilitasi Sarana Pengolahan dan Pemasaran.	105 POKL	0 POKL	25 POKL	25 POKL	100.00	50 POKL	75 POKLAHSAR	71.43

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1	250 Ton	0 Ton	50 Ton	50 Ton	100.00	50 Ton	100 Ton	40.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kabupaten/ Kota	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota.								
	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu)	250 Pelak	0 Pelak	225 Pelak	115 Pelak	51.11	50 Pelak	165 Pelaku Usaha	66.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi.								

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara Tahun 2023 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 cukup baik, namun diharapkan kedepannya bagi sub kegiatan yang belum atau kurang mendapatkan alokasi anggaran (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Non Urusan/Generik) dapat menjadi perhatian secara bersama untuk pengalokasian ataupun penambahan anggaran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara menyelenggarakan urusan pilihan yaitu urusan kelautan dan perikanan. Penyelenggaran pembangunan kelautan dan perikanan seperti yang tertuang dalam Renja Tahun 2023, memberi dampak positif terhadap pencapaian target kinerja yang ditetapkan sebagai berikut :

1) Indeks Nilai Tukar (Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan)

   Indeks Nilai Tukar (Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan mencapai angka rata – rata 103 dari tiga nilai tukar yang diukur. Data ini merujuk pada hasil perhitungan Tenaga Ahli dari Universitas Mulawarman. Nilai yang dicapai ini megindikasikan bahwa terjadi peningkatan kemampuan rumah tangga perikanan dalam memenuhi kebutuhan biaya produksi pada usaha sektor perikanan yang dijalankan. Dari hasil analisis terdapat permasalahan pada NTPi sektor budidaya khususnya udang windu dalam tambak dari total penerimaan sebesar 0,92 (NTPi<1) sedangkan NTPi dari penerimaan usaha perikanan bernilai 1,53 amngka ini memberikan penafsiran bahwa kemampuan rumah tangga petambak dalam memenuhi kebutuhan hidup masih berada pada skala subsisten, meskipun usaha tambak dapat terpenuhi dengan maksimal.

2) Nilai Produksi Perikanan.

Nilai produksi perikanan berdasarkan Data Statistik Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebesar Rp.8.925.000.000.000 melebihi dari target sebesar Rp.8.310.000.000.000 memperlihatkan peningkatan yang signifikan dari Tahun 2022. Intervensi anggaran kepada para pembudidaya dalam memenuhi kebutuhan pakan, benih dan sarana berdampak positif terhadap produksi yang kemudian dapat mendongkrak nilai produksi perikanan, selain itu juga penyaluran sarana pennagkapan ikan dan pengolahan ikut andil dalam mendongkrak nilai produksi sektor perikanan.

3) Produksi Perikanan Tangkap.

Data statistic perikanan tangkap 2023 memperlihatkan data yang cukup baik pada aspek produksi. Dari target yang ditetapkan, angka produksi perikanan tangkap 2023 diatas angka target, yaitu dari 86.520 Ton target menjadi 98.397 Ton Realisasi. Pencapaian ini dimungkinkan karena peran aktif Pemerintah dalam mengoptimalkan kegiatan penangkapan ikan dengan kebijakan pendistribusian BBM bersubsisdi langsung ke sentra nelayan, khususnya di wilayah pesisir. Disamping hal itu, adanya program bantuan langsung tunai untuk membantu biaya operasional serta distribusi sarana penangkapan ikan yang cukup masih kepada nelayan menambah gairah nelayan untuk meningkatkan kapasitas produksi hasil tangkapannya.

4) Produksi Perikanan Budidaya.

Produksi perikanan budidaya di Tahun 2023 berdasrkan perhitungan data statsistik perikanan budidaya mengalami peningkatan signifikain dari target sebesar 165.751 ton meningkat sebesar 191.122,52 ton. Peran aktif pemerintah dalam menhyalurkan subsidi pakan dalam bentuk BLT memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi budidaya, selain itu juga penyalauran bantuan sarana pada kelompok – kelompok perikanan juga memberikan dampak signifikan. Produksi budidaya non ikan juga ikut mendongkrak produksi perikanan budidaya diantaranya kerrang dara dan rumput laut.

5) Persentase Kasus Ilegal Dan Destruktif Fishing Yang Dituntaskan.

Kegiatan pengawasan Sumber Daya Ikan pada Tahun 2023, terdapat beberapa pelaku kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap illegal (Setrum) yang didapati melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap ikan setrum. Juga ditemukan penggunaan alat tangkap ikan sawaran yang masuk kedalam alat tangkap illegal. Kinerja yang cukup baik dalam upaya menurunkan kegiatan aktifitas illegal fishing dipengaruhi oleh upaya sistematis dan terkoordinir oleh beberapa stake holder, seperti hadirnya Dinas Kelautan dan Perikanan propinsi dengan sarana dan prasarana yang dimiliki, peran aktif apparat Desa, Kecamatan, Pol PP dan pihak kepolisian dalam kegiatan pengawasan, edukasi kepada masyarakat serta upaya penggantian alat tangkap illegal dengan alat tangkap yang ramah lingkungan.

6) Produksi Pengolahan Hasil Perikanan.

Produksi Pengolahan Hasil Perikanan merupakan salah satu pelaku usaha perikanan yang juga mengalami perbaikan dengan adanya pertumbuhan produksi. Jika dilihat dari angka capaian terhadap angka target yang ditetapkan. Pencapaian ini cukup berdampak positif pada tingkat kesejahteraan pelaku usaha, jika dibandingkan pada kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan. Produksi olahan hasil perikanan hingga saat ini belum cukup berkembang, terlihat dari jenis olahan yang masih bertahan pada olahan ikan kering, amplang, kerupuk ikan.

7) Eskpor Produk Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan ekspor produk hasil perikanan, hingga saat ini masih terus berlangsung dengan komoditi yang masih sama yaitu Udang Beku, Kepiting Bakau, dan Ikan Betutu. Pertumbuhan ekspor di Tahun 2023 mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan dari target sebesar 1.607 ton terealsiasi sebesar 1.717 ton. Komoditi udang windu masih belum mampu mendongkrak jumlah ekspor produk kelautan dan perikanan. Berlimpahnya produksi udang di Negara India dengan harga yang lebih murah berdampak pada secara langsung pada

komoditi udang di Indonesia. Dengan harga yang turun, pelaku ekspor dalam negeri harus menurunkan harga beli dari produsen udang agar dapat bertahan. Kondisi ini diperparah dengan menurunnya permintaan komoditi udang dipasar Dunia sebagai akibat dari tidak stabilnya ekonomi Dunia akibat perang yang terjadi di negara eropa yang merupakan salah satu tujuan utama ekspor komoditi udang.

8) Jumlah Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan Terfasilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan.

Fasilitasi Pelaku usaha perikanan yang dalam hal ini Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan merupakan salah satu target yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam upaya peningkatan kapasitas produksi pelaku usaha perikanan. Pada Tahun 2023, terdapat sejumlah 14.133 pelaku usaha perikanan mendapatkan sarana produksi dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dari beberapa sumber pendanaan. Upaya ini berdampak positif bagikegiatan penagkapan ikan dan Pengolahan Hasil Perikanan, namun kurang optimal untuk menumbuhkan gairah bagi pelaku usaha budidaya karena harga jual komoditi ikan hasil budidaya cenderung stagna bahkan mengalami penurunan yang tinggi pada komoditi tertentu seperti komoditi udang.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel TC.30 berikut ini :

Tabel TC.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	Nilai Tukar Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Pengolah Hasil Perikana n (Nilai)			101,5	102	103	104	103	103	104	terj

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	Nilai Produksi Perikanan (Milyar Rp.)			7.386	8.310	9.390	10.658	8.925	9.390	10.658	Ant

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	Produksi Perikanan			82.400	86.520	95.172	104.689	82.905.7	86.520	95.172	per

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	Tangkap (Ton)										

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)			150.656	165.721	185.608	207.881	191.122,52	185.608	207.881	Pro

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	Persentase Kasus Ilegal Dan Destruktif Fishing Yang Dituntaskan (%)			92	93	95	98	93	95	98	up

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Ton)			22.672	23.900	25.095	26.350	60.370	25.095	26.350	Pen

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	Eskpor Produk Kelautan dan Perikanan (Ton)			1.530	1.607	1.687	1.771	1.717	1.687	1.771	Ber

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	Jumlah Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan Terfasilitasi Sarana dan			5.000	5.000	5.000	5.000	14.133	7.578	5.000	Dar

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	Prasarana Perikanan.										

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Cat
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara.

1. Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara.

Berdasarkan UU Nomor23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kelautan dan Perikanan Kabupaten hanya memiliki 5 urusan kewenangan, yaitu Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pemberdayaan Pembudidaya Kecil, Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pengelolaaan Kawasan Buidaya Ikan dan Izin Budidaya Ikan. Terbitnya UU tersebut, disikapi dengan dibentuknya Organisasi Perangkat Daerah yang baru dengan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)yang disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelayanan, maka dilakukan penyusunan Renstra Kelautan dan Perikanan yang mengacu pada kewenangan tersebut di atas sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan, yang didalamnya memuat program kegiatan serta sasaran terukur yang akan dicapai.

Dalam perjalanannya, pelaksanaan UU Nomor23 Tahun 2014, khususnya terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Kabupaten Kota dalam pengelolaan Kelautan da Perikanan mengalami perubahan dengan terbitnya Perauran Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Keputusan Menteri Dalam Negeri ini memerlukan penyesuaian dalam internal Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kukar, termasuk didalamnya penyesuaian terhadap Program dan Kegiatan.

2. Penetapan Ibu Kota Negara.

Penetapan Ibu Kota Negara di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur akan berdampak besar bagi kawasan-kawasan penyangga seperti Kabupaten Kutai Kartanegara. Dampak dimaksud harus dipandang sebagai peluang, khususnya bagi pemabngunan kerlautan dan perikanan sehingga dapat membawa kesejahteraan bagi pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan.

3. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara, terdapat beberapa permasalahan maupun hambatan yang dihadapi, diantaranya :

a. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan terkait dengan keterampilan dan adopsi teknologi perikanan yang menyebabkan terbatasnya tingkat produktivitas usaha perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan.

b. Masih perlunya peningkatan pemahaman, kesadaran, kepedulian dan partisipasi masyarakat kelautan dan perikanan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan.

c. Penurunan potensi sumberdaya ikan (SDI) akibat kerusakan habitat (terumbu karang dan mangrove), lebih tangkap *(overfishing),* penggunaan alat tangkap terlarang *(*misalnya pemboman, penggunaan *mini trawl),* penggunaan bahan peledak, electrical fishing/Penyetruman dan pencemaran limbah industri serta limbah rumah tangga.

d. Keamanan pangan produk hasil pengolahan ikan yang belum memenuhi persyaratan mutu, misalnya bebas dari bahan tambahan yang dilarang seperti formalin merupakan salah satu permasalahan dalam rangka peningkatan mutu hasil pengolahan perikanan.

e. Terbatasnya sarana prasarana dan teknologi budidaya perikanan dan pengolahan hasil perikanan sehingga produksi yang dihasilkan belum optimal.

f. Dukungan sarana dan prasarana khususnya perikanan tangkap yang belum mampu mengeksploitasi/mengakses WPP 713 seperti keterbatasan armada penangkapan, PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) dan jumlah sumberdaya manusia aparatur yang melayani operasional sarana/prasarana dan pembinaan dalam bidang usaha perikanan.

g. Sebagian nelayan laut masih dikategorikan masyarakat kurang sejahtera yang antara lain disebabkan karena skala usaha penangkapan masih tradisional yaitu menggunakan perahu motor berkapasitas kecil dengan kemampuan *one day fishing,* dengan area penangkapan pada perairan pantai yang kondisi sumberdaya ikannya sudah over fishing.

h. Kerusakan lingkungan, bencana alam dan dampak perubahan iklim serta meningkatnya aktivitas pemanfaatan sumberdaya di kawasan hulu dan pesisir tanpa memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan serta pencemaran limbah industri dan rumah tangga yang menyebabkan menurunnya daya dukung lingkungan perairan berakibat pada rendahnya produktivitas perikanan budidaya.

i. Konflik nelayan dan tindak pidana perikanan yang secara umum disebabkan karena menurunnya sumberdaya perikanan dan kelautan, penggunaan bahan dan alat tangkap terlarang, perebutan daerah penangkapan *(fishing ground),* pelanggaran jalur penangkapan, pengrusakan lingkungan/penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, dan isu nelayan luar atau andon.

4. Visi-Misi Bupati Kutai Kartanegara.

visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara yang tetuang dalam darft RPJMD 2021-2026 dalam hal urusan kelautan dan perikanan tertuang dalam

Misi 1 : Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani

Misi ke 2 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya, dan

Misi ke 3 : Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Misi tersebut diintegrasikan dalam Renstra Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara, sehingga target kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu instrument pencapaian Visi Misi Kepala daerah.

5. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu mengelola faktor lingkungan organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sebagai modal dasar untuk merumuskan strategi pembangunan kelautan dan perikanan.

Pada konteks pembangunan dimaksud, lingkungan strategis eksternal yang secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara yakni: *Code of Conduct for Responsible Fisheries dan International Plan of Action, Millennium Development Goals* Kelautan dan Perikanan, *Sustainable Development Goals* Kelautan dan Perikanan*, The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* pada Tahun 1994, serta *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC).* Selain itu, terdapat pula berbagai fakta Internasional dan Regional, seperti *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Lingkungan strategis kelautan dan perikanan internal yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan perikanan yakni (1) aspek ekonomi yang berfokus pada upaya peningkatan kontribusi sektor perikanan

terhadap PDRB, (2) aspek sosial dan politik, yang berkaitan dengan konstelasi politik di tingkat nasional maupun daerah serta pembagian wewenang urusan perikanan dengan pemerintah daerah dalam koridor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (3) kerangka kebijakan dan hukum nasional, terkait dengan ratifikasi berbagai konvensi internasional, pelaksanaan Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Perpres, Keppres, Inpres, dan berbagai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berkenaan dengan bidang kelautan dan perikanan (termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan), (4) sistem kelembagaan dan pemerintahan di pusat dan daerah, terutama menyangkut sinergi dan dukungan lintas K/L terkait serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota, (5) perkembangan Iptek dan teknologi informasi, terutama terkait dengan penyediaan data statistik perikanan yang handal sangat diperlukan sebagai data dasar untuk mengukur tingkat eksploitasi dan status stok ikan, (6) kapasitas sumber daya manusia, terutama berkaitan dengan pendayagunaan peran strategis sumberdaya manusia perikanan sebagai penentu keberhasilan kegiatan di sentra-sentra pengolahan berbasis produk perikanan, dan (7) sistem pengawasan, terutama terkait dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk menjamin ketertiban pelaksanaan pemanfaatannya demi terjaganya kelestarian sumberdaya tersebut, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Hal penting lain yang menjadi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan adalah :

a. Posisi strategis dan keunikan sumberdaya perikanan, dimana wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada kawasan Delta Mahakam yang merupakan kawasan strategis dalam aspek lingkungan pesisir serta berhadapan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) yang berpotensi besar untuk pengembangan ekonomi kemaritiman. Sumberdaya perikanan darat di wilayah ini memiliki spesies mamalia Pesut Mahakam *(Orcaella brevirostris)* yang merupakan jenis yang paling langka di dunia.

b. globalisasi ekonomi (misal MEA dan APEC) semakin lebih membuka peluang pengembangan pasar ekspor.

Degradasi sumberdaya kelautan dan perikanan masih terjadi, terlihat dari gejala adanya over exploitasi serta timbulnya beberapa dampak dari terjadinya pencemaran lingkungan perairan akibat aktifitas industri dan rumah tangga di hulu maupun di wilayah pesisir.

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD

Rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan melaui analisis dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2021-2026 serta urusan Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan. fungsi dan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan terkait erat dengan pencapaian misi ke 1 yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani, ke-2 yaitu Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya, dan Misi ke 3 yaitu Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Misi ke 2 yang menjadi bagian tugas dan fungsi kelautan dan perikanan adalah program ke 8 yaitu Program Kesejahteraan Sosial dimana salah satu focus program yang sejalan dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Fasilitasi Pengembangan Usaha bagi masyarakat miskin minimal 1.000 Penduduk PerTahun yang dengan sasaran program pada verifikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan.

Misi ke 3 yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi Kelautan dan Perikanan terdapat dalam program 1 yaitu Program Pembangunan Pertanian berbasisi kawasan, khusunya pada point Fasilitasi sarana dan prasarana 25.000 Nelayan & Pembudidaya Perikanan Produktif dalam upaya peningkatan produksi dan akses pemasaran.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD dapat dilihat pada Tabel TC.31.

Tabel TC .31. Rencana Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara.

Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	
	NON URUSAN (GENERIK)					18,903,308,130	NON URUSAN (GENERIK)					19,421,843,487	
	PROGRAM PENU		Nilai Sa		Angka	18,903,3	PROGRAM PENUNJAN		Nilai Sakip Perangkat		Angka	19,421,8	

	NJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		kip Perangkat Daerah			08,130	GURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Daerah			43,487	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kin		Jumlah Dokumen Re	5	Doku	576,766,085	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Peran		Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi	3	Dokume	1,050,000	

	erja Perangkat Daerah		ncana, Anggaran dan Evaluasi Kin				gkat Daerah		Kinerja.				

			erja.										
							PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	DKP	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dikume	50,000,000	Koordinasi walidata pendukung statistik sektoral daerah

							PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	DKP	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	Data	250,000,000	Pelaksanaan pengumpulan data sektoral daerah, Satu Data (BECIK) - Kecamatan sebagai pusat data (operasional,Honorarium, Peralatan, pendampingan teknis)

							P ELAK SANA AN FORU M PERA NGKA T DAER AH BERD ASAR KAN BIDA NG URUS AN YANG DIAM PU	DKP	Jumlah Berita Acara Hasil Foru m Peran gkat Daera h Berda sarka n Bidan g Urusa n yang Diam pu dalam Rang	1	Berita	50,0 00,0 00	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)

							DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH		ka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencana	DKP	Jumlah Dokumen Pe	1	Doku	300,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokume	500,000,000	Penambahan Anggaran Untuk Penyusunan Renstra

	an Perangkat Daerah		rencana an Perangkat Daerah				Daerah							
	Koordinasi	DKP	Jumlah Dok	1	Doku	35,000,000	Koordinasi dan	DKP	Jumlah Dokumen RKA-		Dokumen	-		Penyusunan Dokumen RKA dapat dilaksanak

	dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		unen RKA-SKPD dan Laporan Hasil K				Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.				an tanpa Pembiayaan.

			oordinasi Penyusunan Dokumen RK										

			A-SKPD.										
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DKP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Doku	35,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DKP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-		Dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA dapat dilaksanakan tanpa Pembiayaan.

			SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi						SKPD.					

			iPenyusunanDokumenPerubahanR										

			KA-SKPD.										
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	DKP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	1	Lapor	35,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	DKP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		Laporan	50,000,000	

	Kinerja SKPD		jadan Ikhtisar Realisasi Kinerj						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.				

			aSKPDdanLaporanHasilKoordina										

			sipenyusunanLaporanCapaianKi										

			nerjadanIkhtisarRealisasiKin										

			erjaSKPD.										
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKP	Jumlah Laporan Evaluasi Kin	1	Lapor	171,766,085	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	2	Dokume	150,000,000	Untuk Pelaksanaan Evaluasi Renstra dan Evaluasi Renja

			erjaPerangkatDaerah.										
	Administrasi Keuangan Perangkat		Jumlah Dokumen	23	Doku	15,354,893,921	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Adminsitrasi	21	Dokume	14,265,195,363	

	Daerah		Laporan Administrasi Keuangan P						Keuangan Perangkat Daerah.					

			erangkat Daerah.										
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	Orang	15,059,893,921	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	Orang/	13,990,195,363	

			erimaGajidanTunjangan ASN										

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DKP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Lapor	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DKP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	3	Laporan	25,000,000	Laporan Keuangan Akhir Tahun : Laporan catatan atas laporan keuangan (CALK); Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Operasional (LO)

			PDdanLaporanHasilKoordinasiP											

			enyusunanLaporanKeuanganAkhi										

			rTahunSKPD.										
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DKP	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan	1	Doku	25,000,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DKP	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	Dokume	-	Dapat disediakan tanpa Pembiayaan, anggaran difokuskan pada sub kegiatan penting lainnya.

			gapanPemeriksaandanTindakLan										

			jut Pemeriksaan										
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuang	DKP	Jumlah Laporan Keuangan	18	Lapor	225,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula	DKP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	Laporan	225,000,000	

	an Bulanan/Triwulanan/Semesteran		anBulanan/Triwulanan/Semeste				nan/Semesteran		dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.				

			transKPDdanLaporanKoordinasiP										

			enyusunanLaporanKeuanganBula										

			nan/Triwulanan/Semesteran SKP										

			D.										
	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DKP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan An	1	Doku	25,000,000	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DKP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokume	25,000,000	

			analisisPrognosisRealisasiAnggaran										

			aran										
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebut	6	Doku	65,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokume	80,000,000	

			uhan Barang Milik Daerah SKPD										
	Penyusu	DKP	Jumlah Re	1	Doku	10,0	Penyusunan	DKP	Jumlah Rencana	1	Dokume	25,0	Penambahan anggaran untuk

	nan Per enc ana an Keb utu han Bar ang Mili k Dae rah SKP D		nc ana Ke but uh an Ba ran g Mi lli k Da e			00,0 00	Peren canaa n Kebut uhan Baran g Milik Daera h SKPD		Kebut uhan Baran g Milik Daera h SKPD			00,0 00	peningkata n kualitas laporan.

	rah SKPD												
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pad	DKP	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan	1	Lapor	25,000,000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	DKP	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.	1	Laporan	25,000,000	

	a SKPD		n, Pengawasan, dan Pengendalian										

			Barang Milik Daerah pada SKPD.											

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	DKP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyu	1	Lapor	10,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	DKP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	30,000,000	

			sunanLaporanBarangMilikDaera										

			hpadaSKPD										
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	DKP	Jumlah Laporan Penatausahaa	3	Lapor	20,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	DKP	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Laporan	-	Dapat dilaksanakan tanpa Pembiayaan, anggaran dapat difokuskan pada sub kegiatan lain.

			anBarangMilikDaerahpadaSKPD											

	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan	1	Doku	10,000,000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.	1	Dokume	10,000,000	

			anDaerahKewenanganPerangkatD										

			aerah.										
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	DKP	Jumlah Laporan Pengelolaan Ret	1	Doku	10,000,000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	DKP	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokume	10,000,000	

			ribusi Daerah										
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administ	3	Doku	125,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian.	1	Dokume	125,000,000	

			rasi Kepegawaian.										
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	DKP	Jumlah Dokumen Pend	1	Doku	25,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DKP	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepeg	1	Dokume	25,000,000	

	Kepegawaian		atau dan Pengolahan Administrasi						awaian				

			siKepegawaian										
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kep	DKP	Jumlah Dokumen Hasil Ko	1	Doku	25,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	DKP	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepeg	1	Dokume	25,000,000	

	ega wai an		ordinasi dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan.										

			nInformasiKepegawaian.										
	Monitoring, Evalua	DKP	Jumlah Dokum	1	Doku	25,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan	DKP	Jumlah Dokumen Monitoring, Evalu	1	Dokume	25,000,000	

	si, dan Penilaian Kinerja Pegawai		enMonitoring, Evaluasi, dan Pen				Penilaian Kinerja Pegawai		asi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				

			ilaianKinerjaPegawai										
	Bimbingan Teknis Implem	DKP	Jumlah Cranga	10	Orang	50,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi	DKP	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	10	Orang	50,000,000	

	entasi Peraturan Perundang-undangan		ng Mengikuti Bimbingan Teknis Im				Peraturan Perundang-undangan		Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				

			pelmentasi Peratur an Perundang										

			-Undangan										
	Administrasi Umum Perangkat Daerah.		Jumlah ASN Kelautan dan Perikanan	110	ASN	745,750,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah.		Jumlah ASN Kelautan dan Perikanan Yang Mendapatkan Layanan	110	ASN	845,750,000	

			kananYangMendapatkanLayanan										

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listr	1	Paket	3,750,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.	1	Paket	3,750,000	

			ik/PenerangandanBangunanKantory										

			angDisediakan.										
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKP	Jumlah Paket Peralatan	1	Paket	100,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	100,000,000	

			ndanPerlengkapanKantoryangDi										

			sediakan										
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKP	Jumlah Paket Bahan Logistik K	1	Paket	50,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.	1	Paket	50,000,000	

			antoryangDisediakan.										
	Penyediaan Barang Cetaka	DKP	Jumlah Paket Ba	1	Paket	50,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan	DKP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa	1	Paket	50,000,000	

	n dan Pen gga nda an		r a n g C e t a k a n d a n P e n g g a n d a a n y a n				Pengg andaa n		n yang Disedi akan				

			gDiisediakan										
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Und	DKP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	1	Doku	42,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DKP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan.	1	Dokume	42,000,000	

	angan		andan Peraturan Perundang-Undan										

			ngan yang Dised iakan.										
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Wilaya	Jumlah Laporan K	-	-	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKP	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	1	Lapoan	100,000,000	Penambahan Sub Kegiatan untuk fasilitasi Tamu.

			unjungan Tamu										
	Penyelenggaraan Rapat	Di	Jumlah Laporan	30	Lapor	450,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Di	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koord	30	Laporan	450,000,000	

	Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordina				Konsultasi SKPD		inasi dan Konsultasi SKPD				

			sidan Konsultasi SKPD										
	Penatausahaan Arsip Dinami	DKP	Jumlah Dokumen P	1	Doku	50,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	DKP	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	1	Dokume	50,000,000	

	s Pada SKPD		enatausahaan Arsip Dinamis pada						pada SKPD				

			SKPD										
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Unit	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah Diadakan	2	Unit	1,02 0,00 0,00 0	

			nunjangUrusanDaerahDiadakan										

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DKP	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas		Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DKP	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit	570,000,000	Penggantian Kendaraan Dinas Jabatan Fungsional (Roda Dua) yang sudah memasuki usia 10th pemakaian

			satauKendaraanDinasJabatanya										

			ngDisediakan										
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKP	Jumlah Unit Peralatan da		Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.		Unit	450,000,000	Penahmbahan anggaran untuk pembelian Generator Set 20KVA untuk Dinas Kabupaten untuk mengganti Genset Dinas yang sudah sering rusak

			nMesinLainnyayangDiseediakan.										dengan usia pemakaian diatas 10th, Pembelian Genset Portable untuk kegiatan diluar kantor

	Pengadaan Gedung Kantor	DKP	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Disediakan		Unit	-	Pengadaan Gedung Kantor	DKP	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangun Lainnya Disediakan				

			ainnyaDisediakan										
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	Laporan	1,485,898,124	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	3	Laporan	1,485,898,124	

	Daerah		edian Jasa Penunjang Urusan Pem						Daerah.				

			erintah Daerah.										
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Day	DKP	Jumlah Laporan Penyed	1	Lapor	250,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	1	Laporan	250,000,000	

	a Air dan List rik		i a a n J a s a K o m u n i k a s i , S u m b e r D a y						Listri k yang Disedi akan.				

			aAirdanListrikyangDisediakaa										

			n.										
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pe	1	Lapor	25,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	25,000,000	

			r a l a t a n d a n P e r l e n g k a p a n K a n t o r										

			yang Disediakan										
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKP	Jumlah Laporan Penyed	1	Lapor	1,210,898,124	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1,210,898,124	

			iaanJasaPelayanaanUmumKantory										

			angDisediakan										
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta		Persentase Pemeliharaan B	90	Persen	540,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjnag Urusan Pemer	90	Persen	540,000,000	

	h Daerah		arang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan.										

			sanPemerintahan.										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bia	DKP	Jumlah Kendaraan Pe	23	Unit	115,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	DKP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23	Unit	115,000,000	

	ya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		rorangan Instansi atau Kendaraan Di				Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				

			nasJabatanyangDipelihara dand										

			ibayarkanPajaknya										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	DKP	Jumlah Kendaraan D	19	Unit	95,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	DKP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeli	21	Unit	95,000,000	

	Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.		inasCperasionalatauLapangany				Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.		harada ndibayarkan Pajak dan Perizinannya				

			angDipeliharadandibayarkanPa										

			jakdan Perizinannnya										
	Pemeliharaan Peralatan dan Mes	DKP	Jumlah Peralatan	2	Unit	50,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	Unit	50,000,000	

	in Lainnya		dan Mesin Lainnya yang Dipelihara										

			ra										
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DKP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	230,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DKP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	230,000,000	

			ainnyayangDipelihara/Direhab										

			ilitasi										
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Ban	DKP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	1	Unit	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.	1	Unit	50,000,000	

	gunan Lainnya		dungKantorataupBangunanLainny										

			ayangDipelihara/Direhabilita										

			si.										
	URUSAN						URUSAN						
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Produksi Perikanan Tangkap		Ton	25,745,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Produksi Perikanan Tangkap		Ton	60,898,600,000	
	Pengelolaan Penangkapan		Jumlah Nelayan		Nelaya	16,875,000,000	Pengelolaan Penangkapan Ikan		Jumlah Nelayan Terfasilitasi		Nelayan	26,398,600,000	

	Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusah		yan Terfasilitasi Sarana Penang				di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten		Sarana Penangkapan Ikan.				

	akan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		kapan Ikan.				/ Kota						
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber	Kabup	Jumlah Data dan Informasi	2	Doku	220,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kabup	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam	2	Dokume	220,000,000	

	Daya Ikan		nasi Sumber Daya Ikan di Perairan						Satu Kabupaten /Kota yang Tersedia.				

			Daratdalam Satu Kabupaten/Kota										

			yang Tersedia.										
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kecam	Jumlah Prasarana Usaha	3	Unit	6,000,000,000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kecam	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia.	4	Unit	6,000,000,000	

			Perikanan Tangkap yang Tersedi										

			a.										
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kec.Sa	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1350	Unit	10,655,000,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kec.S	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				Sub Kegiatan Mengalami Pemutakhiran berganti nama

			kapyangTerjamindanTersedia										

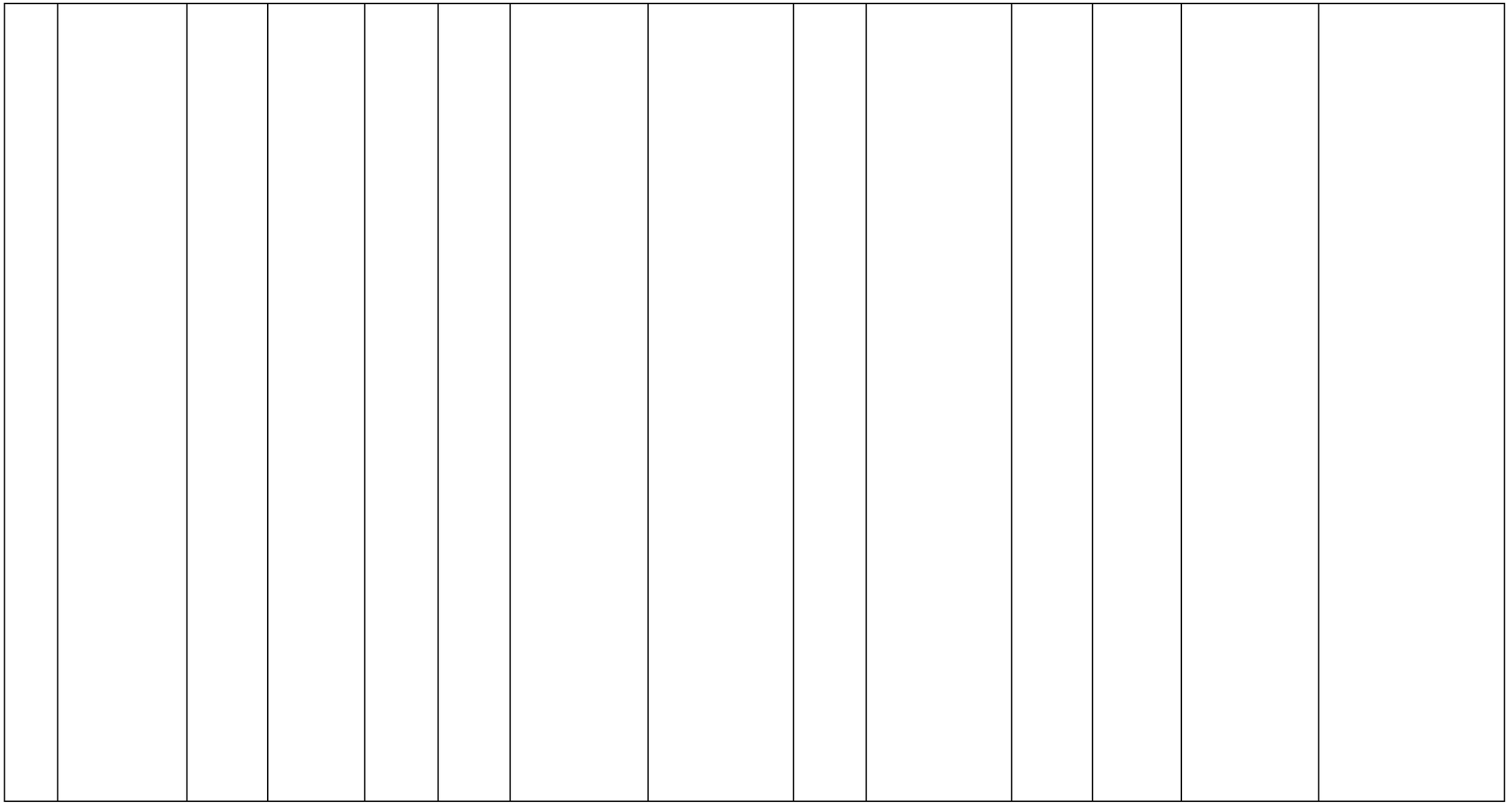

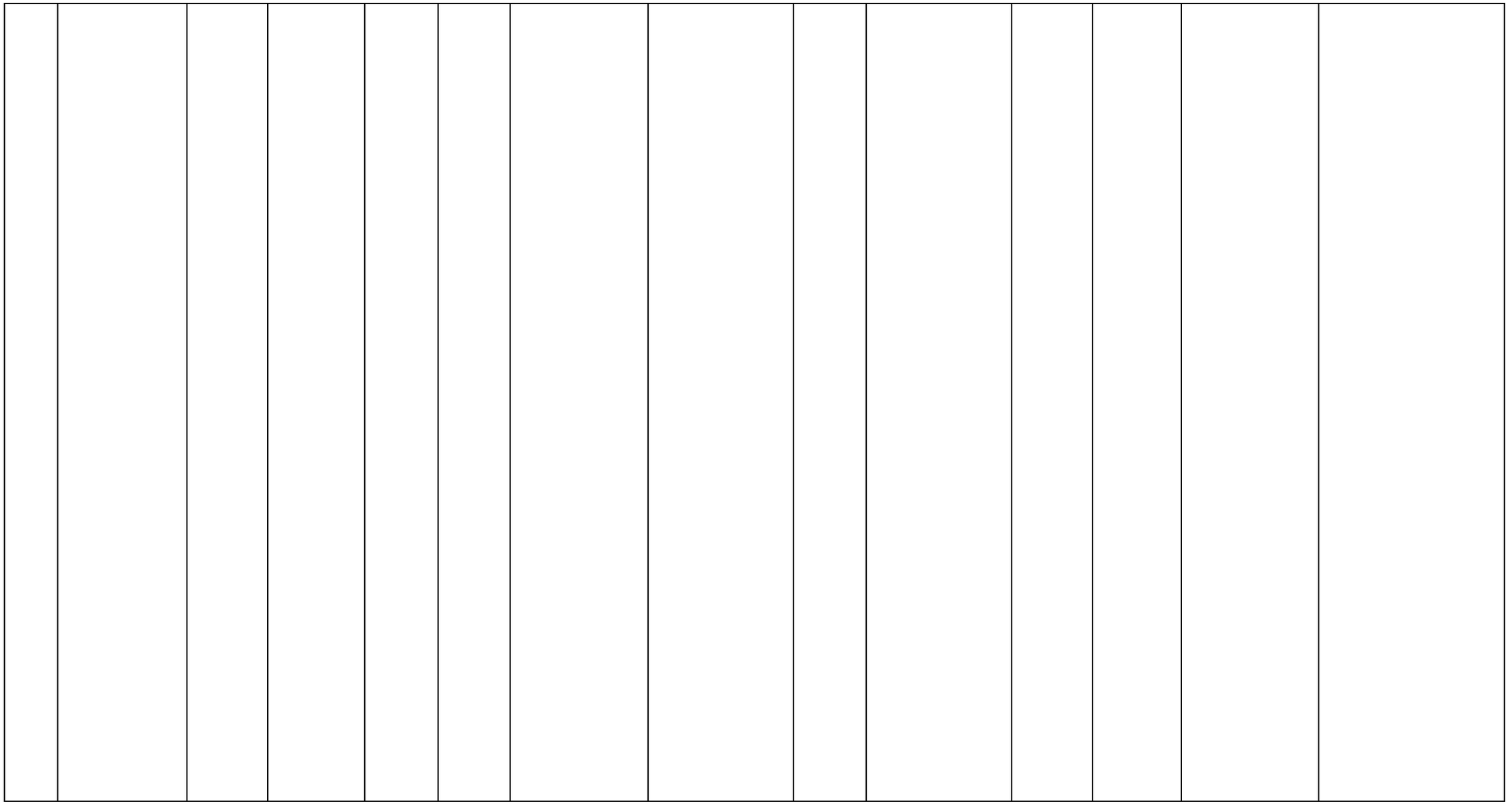

							Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kec.S	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan		Unit	20,178,600,000	(1) Sub Kegiatan Baru Hasil Pemutakhirabn dari Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha

									Tersedia				Perikanan Tangkap (2) Rencana Strategis OPD : Peningkatan Produksi dan Produktivitas serta Nilai Tambah Sektor Perikanan (3) Pilot Project kapal berbahan fiberglass (4) Pembangunan Pertanian Bernasis Kawasan

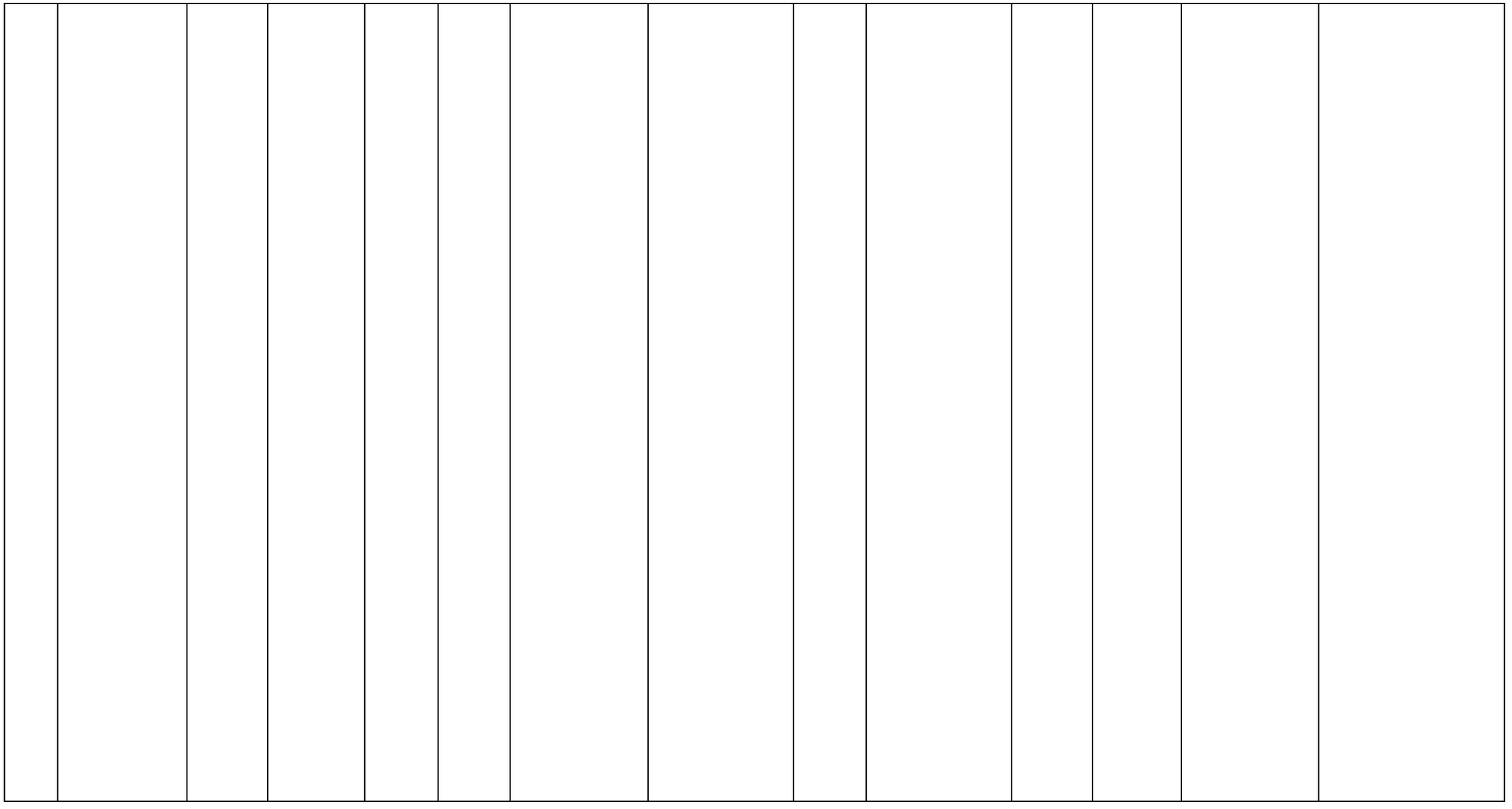

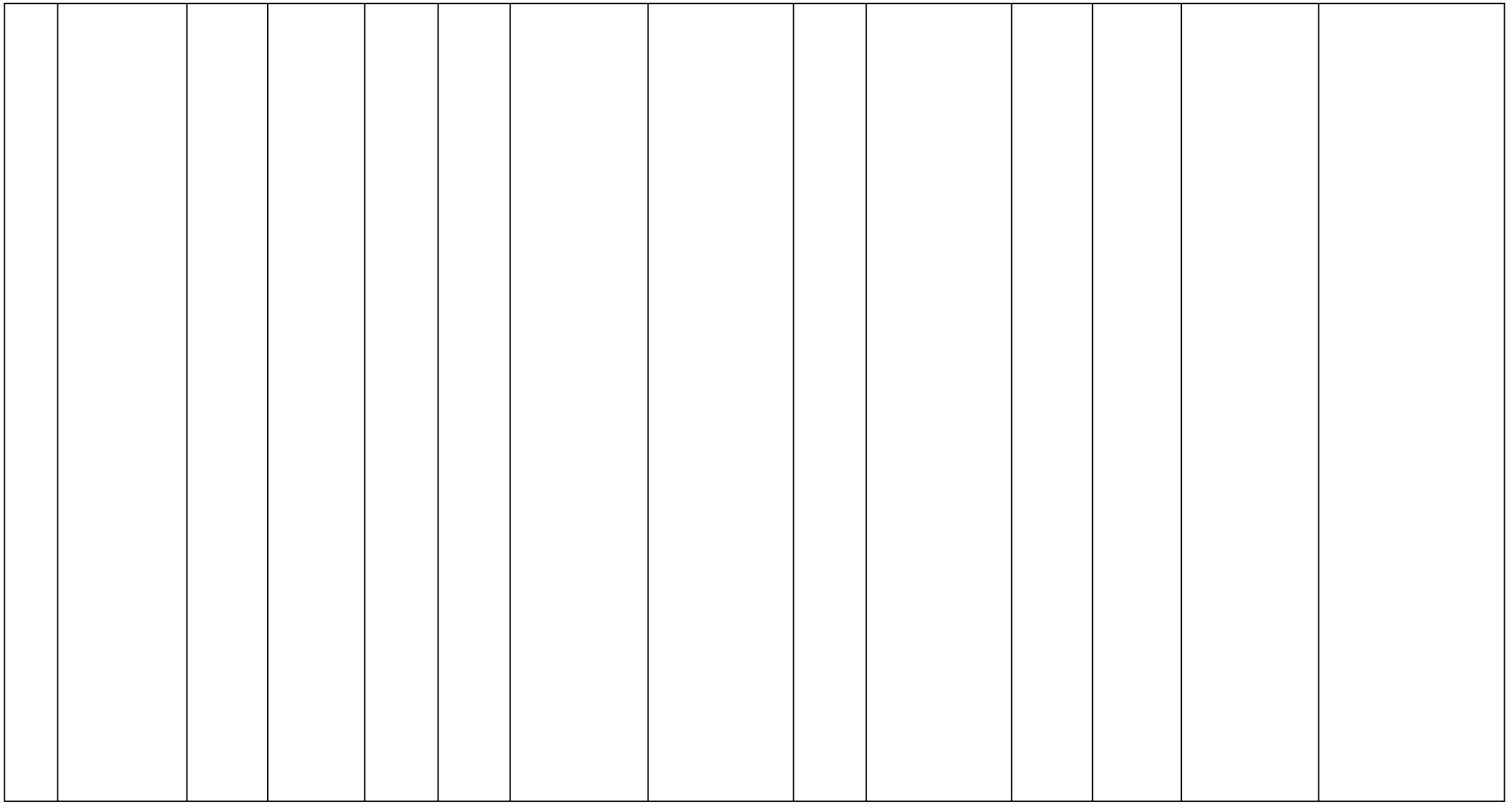

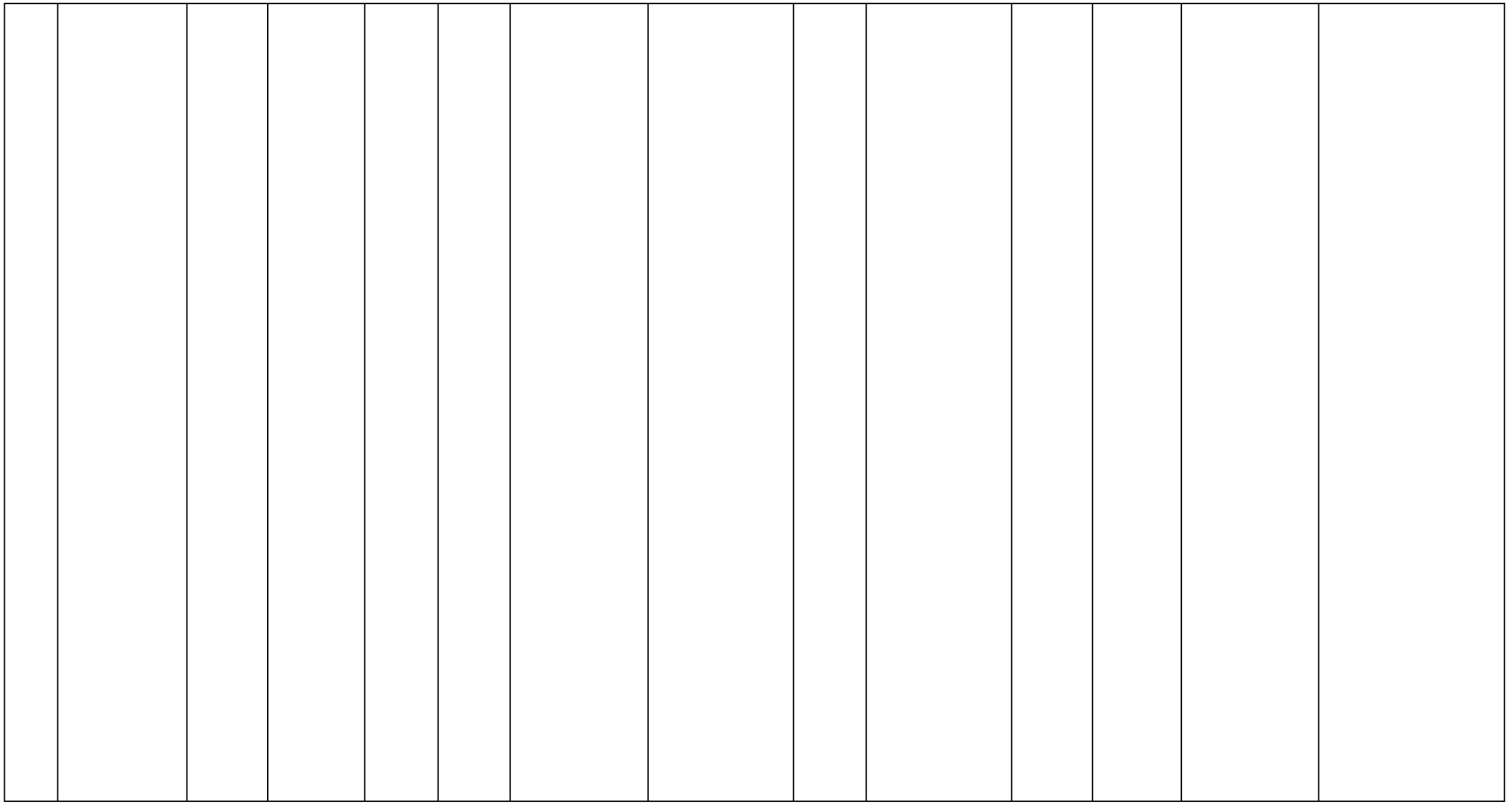

	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah KUB Naik Kelas		KUB	8,270,000,000	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah KUB Naik Kelas		KUB	32,800,000,000	

			Jumlah Nelayan Miskin dan Rentan Miskin		Orang				Jumlah Nelayan Miskin dan Rentan Miskin Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan		Orang		

			nTerfasilitasiSaranaPenanangka										

			pan Ikan										
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kec.	Jumlah Nelayan Kecil yang Meni	840	Orang	7,670,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kec.	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	500	Orang	31,500,000,000	(1) Pemenuhan Target Pengentasan Kemiskinan Pelaku usaha Perikanan Tangkap (Nelayan). (2) Pelatihan Nelayan

			ngkatKapasitasnya										

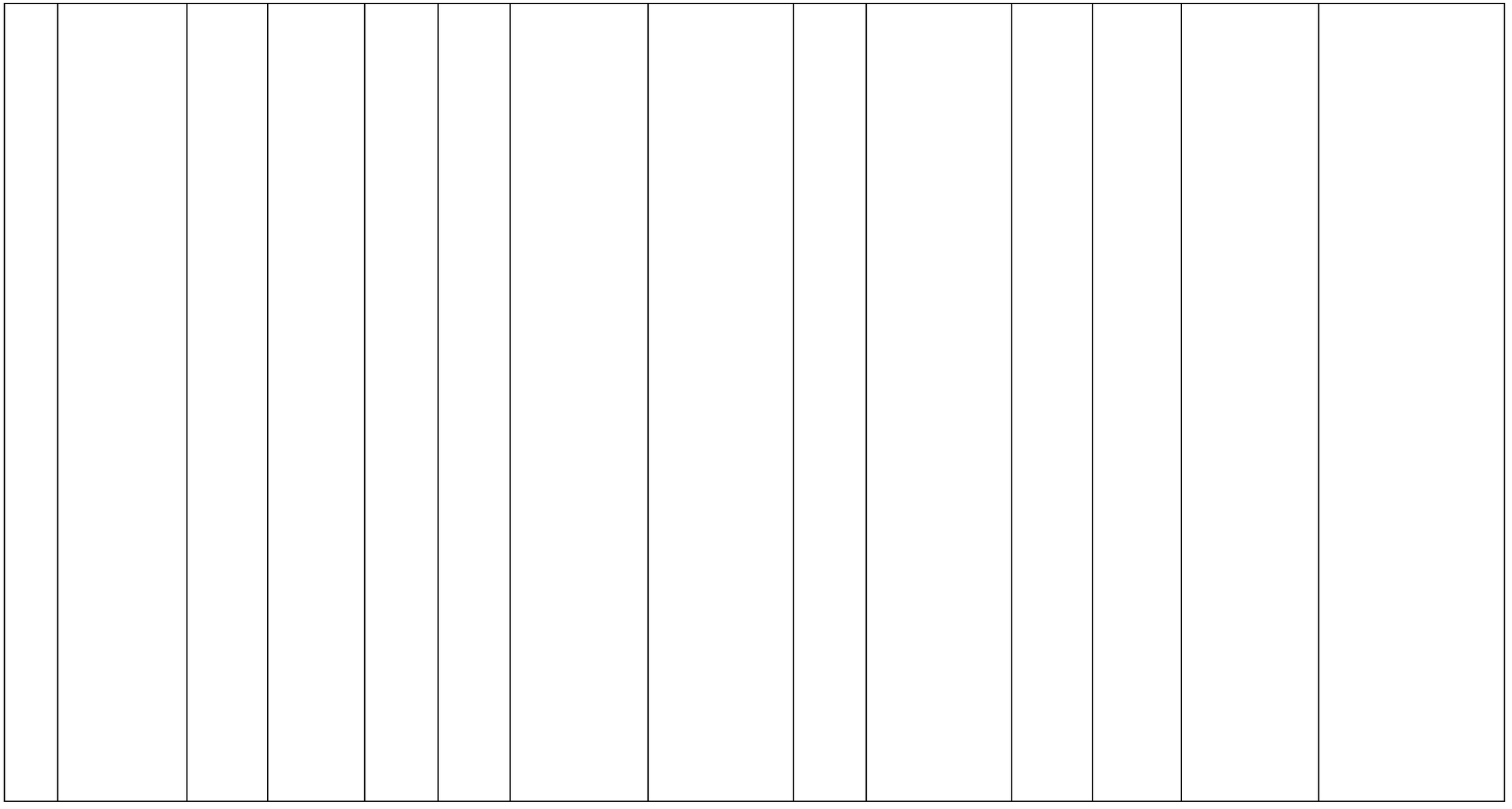

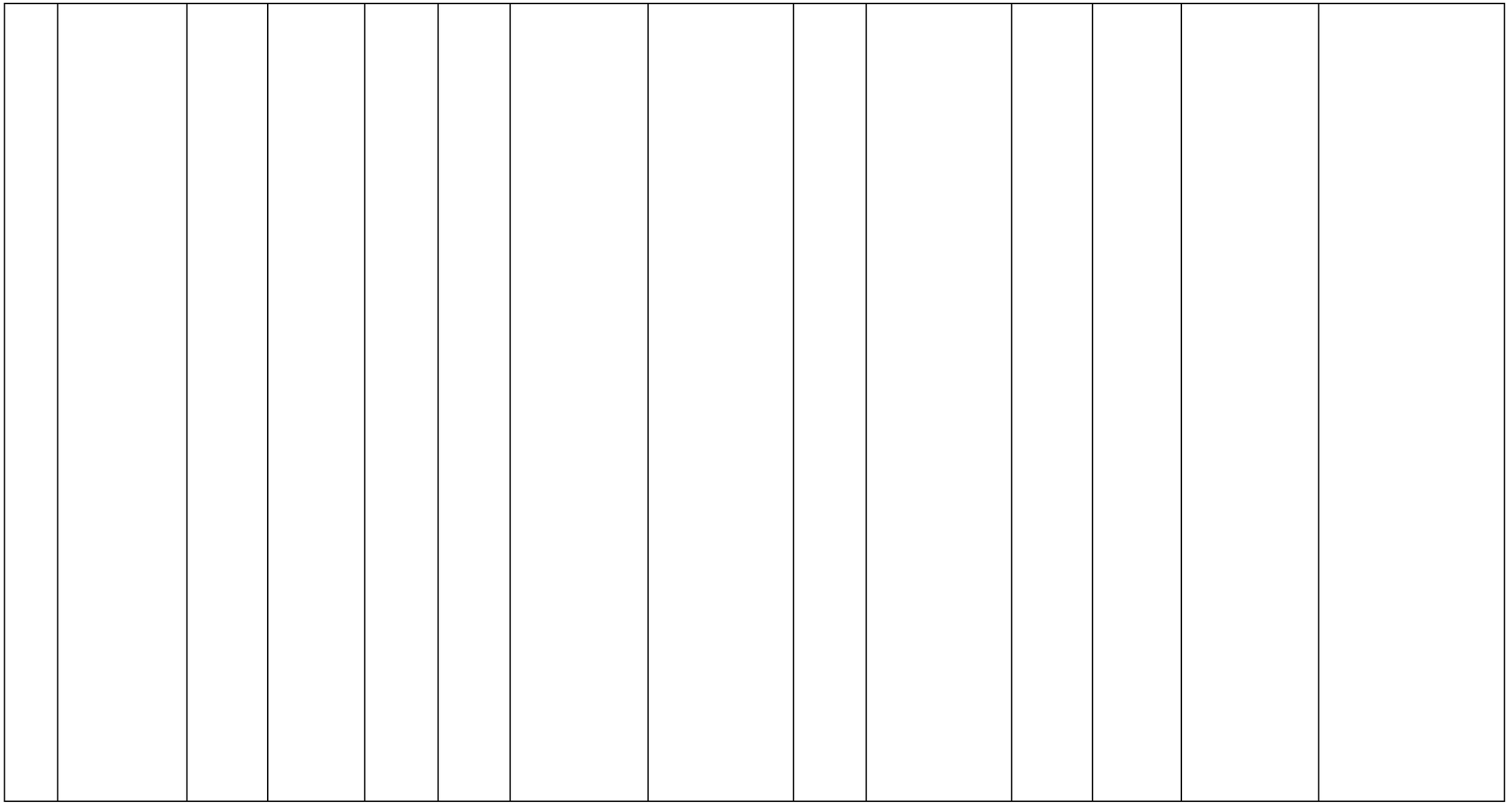

	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kele	Kec.	Jumlah Kelompok Nelayan Ke	100	Kelom	300,000,000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kec.	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelem	50	Kelompo	300,000,000	

	mbagaan Nelayan Kecil		cilyang Difasilitasi Pembentuk						bagaannya.				

			andanPengembangan Kelembagaan										

			nya.										

	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pe	Kec.	Jumlah Unit Usaha yang Difa	100	Unit	300,000,000	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kec.	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan,	100	Unit	1,000,000	Diperlukan dalam rangka fasilitasi pertemuan /rembuk Nelayan. (Pertemuan Penyuluh Swadaya, Pembudidaya Ikan, Pengusaha dan Lembaga Pembiayaan, KTNA)

	mbiayaan, Kemitraan Usaha		silitasi Penyaluran Bantuan Pen						Kemitraan Usaha				

			Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kem										

			itraanUsaha										

	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah TPI Beroperasi	1	Unit	50,000,000	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah TPI Beroperasi	2	Unit	500,000,000	

	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Desa	Jumlah SOP Penglolaan dan Penyelenggaraan	1	Doku	-	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Desa	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	Dokume	-	Kegiatan dapat dilaksanakan tanpa anggaran

			a r a a n T e m p a t P e l e l a n g a n I k a n (T P										

			I)										

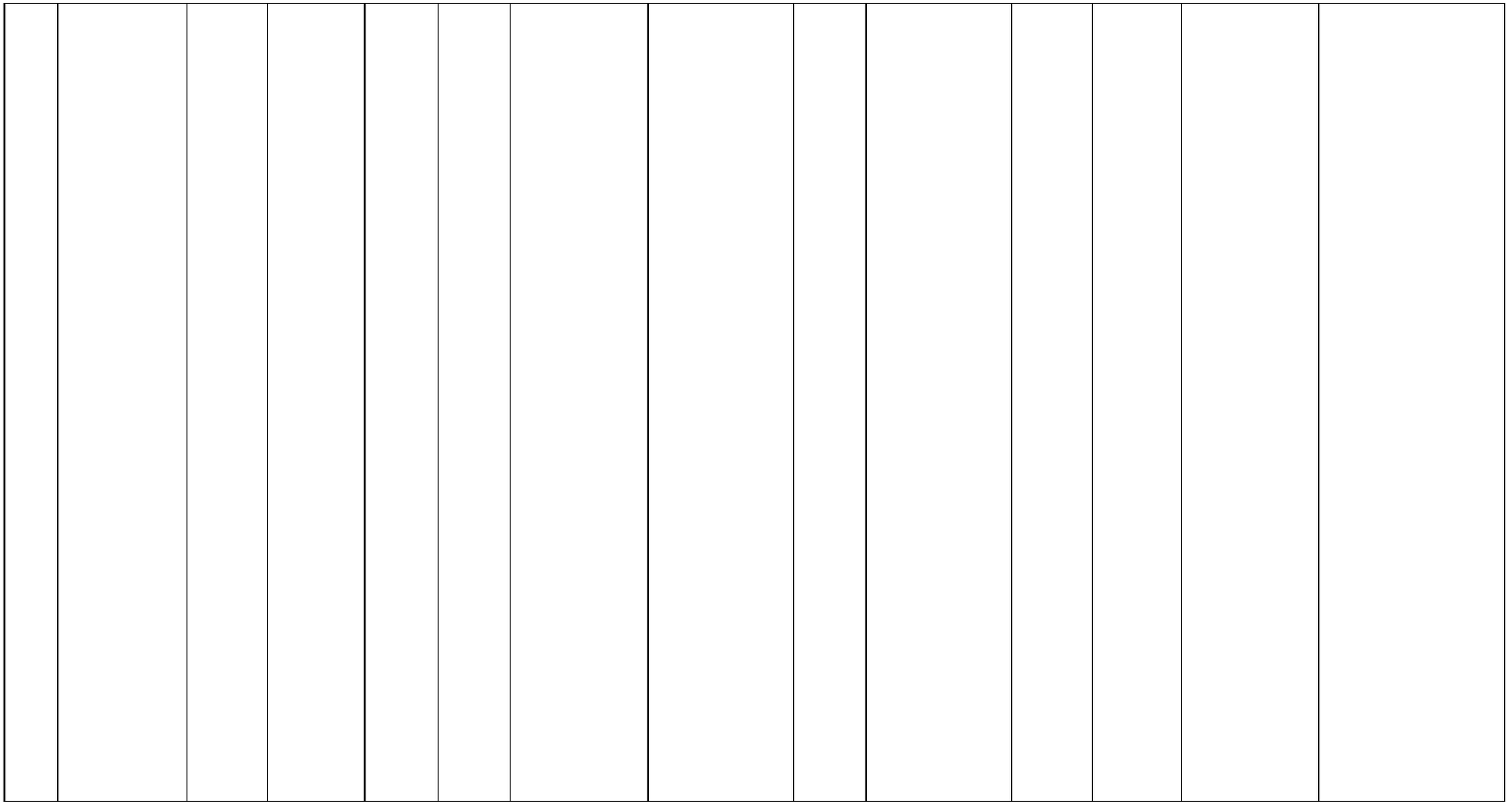

	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan	Desa	Jumlah Layanan dalam rangka	3	Layan	50,000,000	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Desa	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3	Layanan	500,000,000	Untuk peningkatan Kualitas Layanan dalam mendukung optimalisasi operasional TPI.

	Ikan (TPI)		ngkaPenyelenggaraanTempatPel										

			elanganIkan(TPI)										

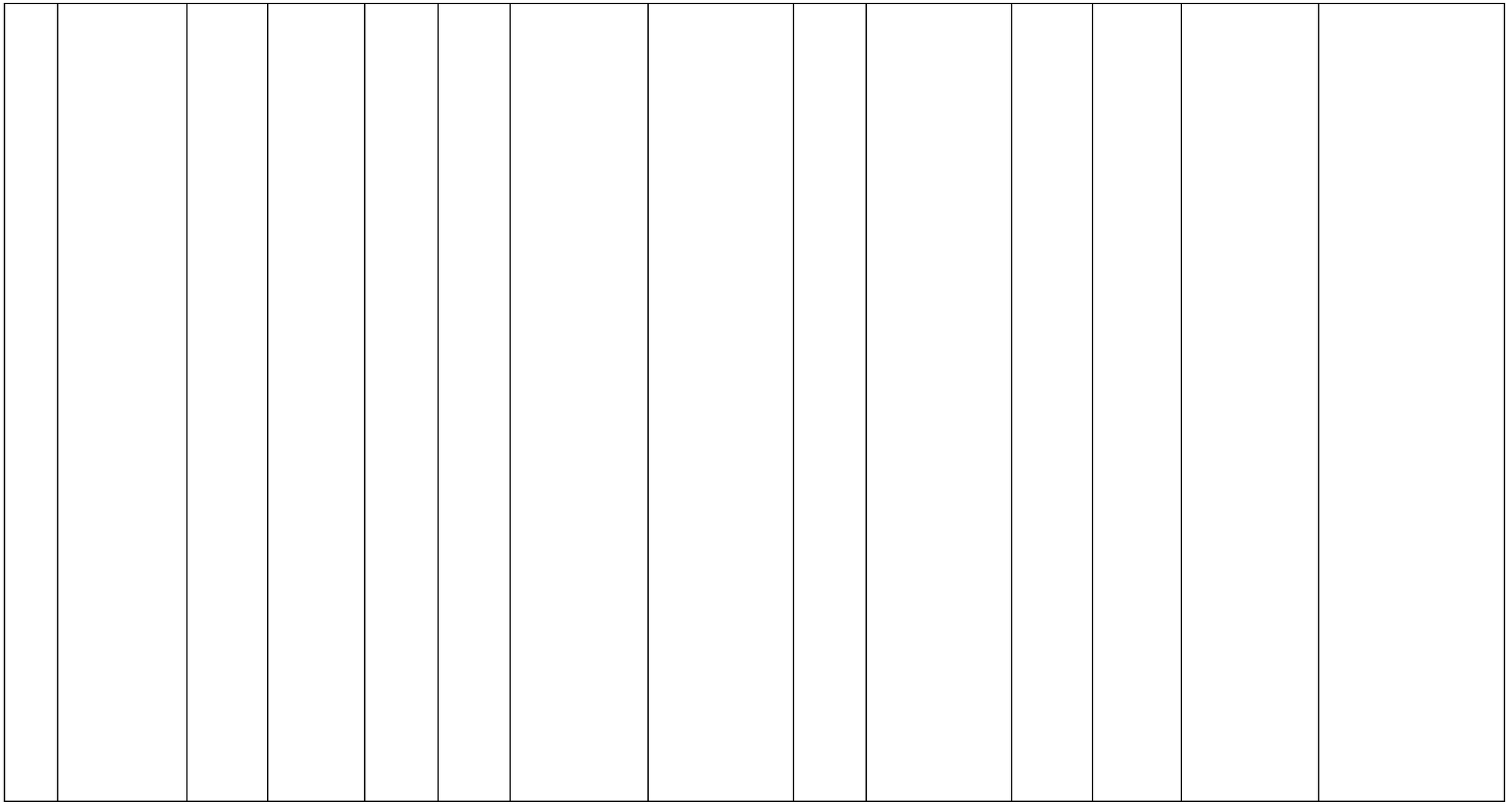

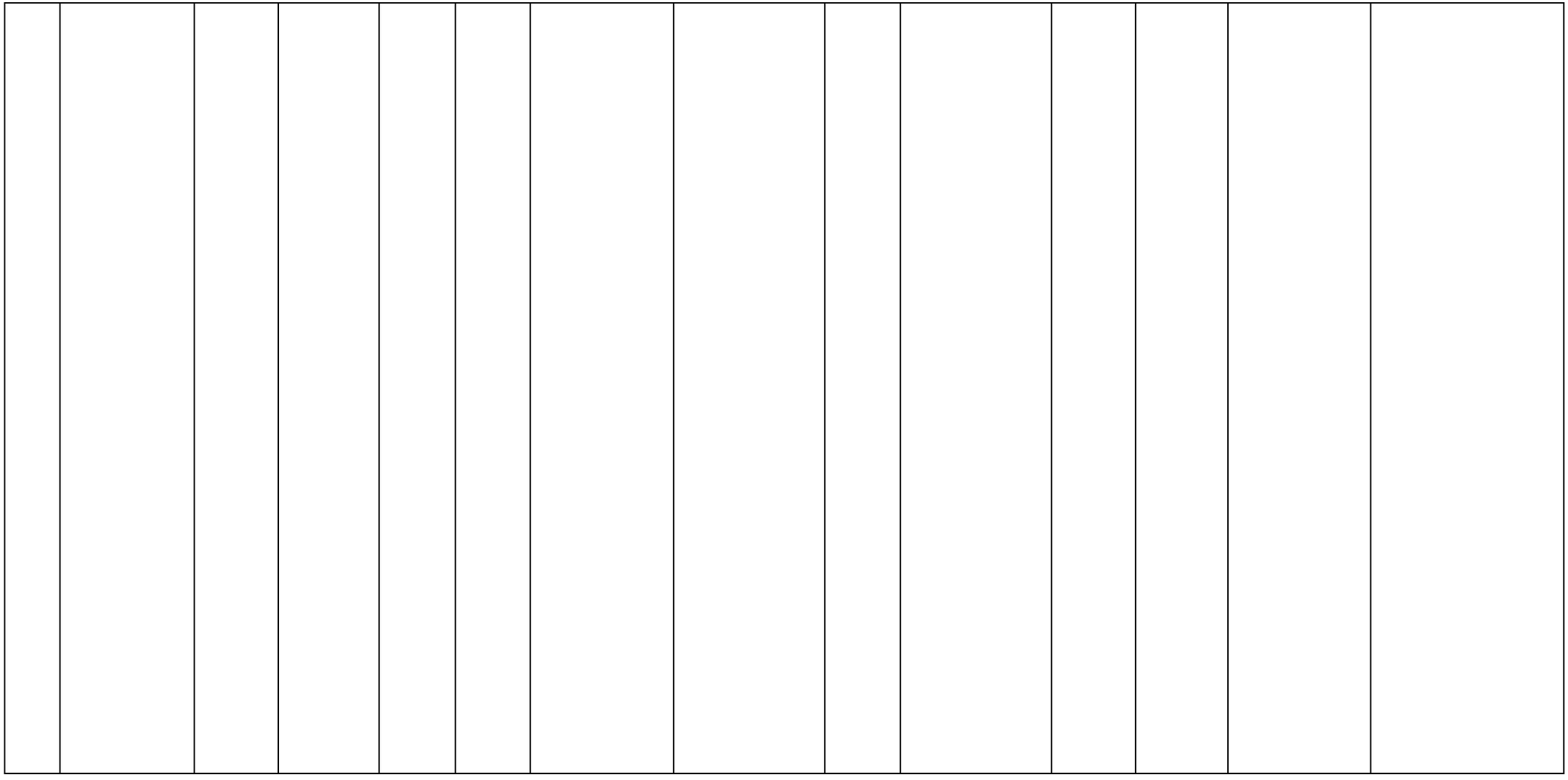

	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya		Jumlah Tanda Pendaftaran Kapal Perikanan		Tanda	500,000,000	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya		Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan diterbitkan		Tanda	1,05 0,00 0,00 0	

	duk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kab		terbitkan				ya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota						

	upaten/Kota												
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal	Kutai	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai	1	Dokumen	-	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai	Kutai	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang	2	Dokumen	50,000,000	Penyediaan Dokumen SOP Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan.

	al Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT		dur Penerbitan Rekomendasi Peri				Dengan 10 GT		Menjadi Kewenangan Kabupaten /Kota.				

			zinanBerusahaPerikanantangka										

			pyangMenjadiKewenangan Kabupa										

			ten/Kota.										
	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran	Kec.	Jumlah Rekomendasi Tanda Da	2000	Reko	500,000,000	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Kec.	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	2000	Rekome	1,00 0,00 0,00 0	Dalam Rangka pemenuhan persyaratan untuk Ketersediaan SPBN

	Sampai Dengan 10 GT		ftar Kapal Perikanan										

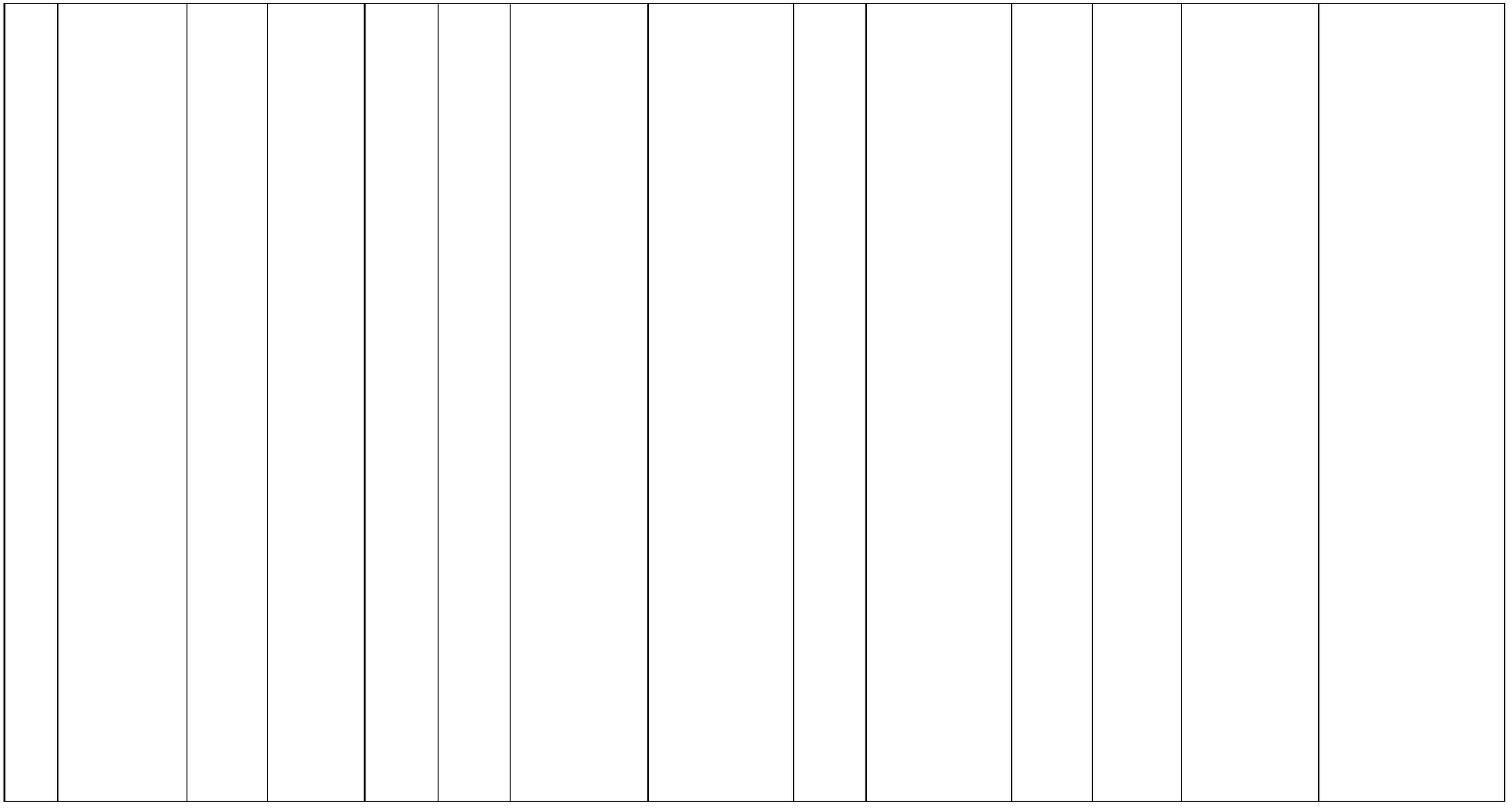

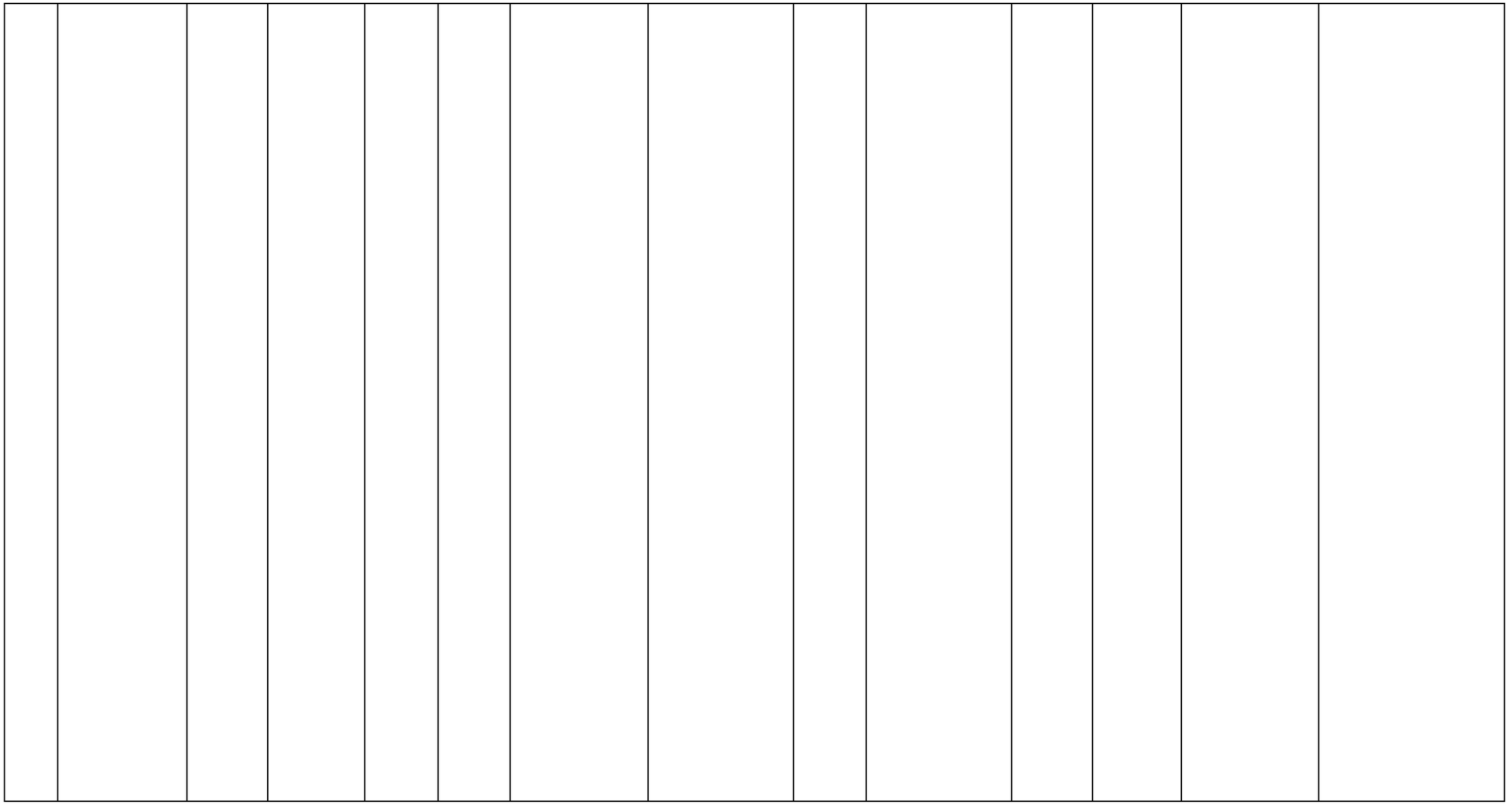

	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Ber		Jumlah Kapal Perikanan Berukuran		Kapal	50,000,000	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau,		Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai 10 GT Terdaftar		Kapal	150,000,000	

	operasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan		kurang sampai 10 GT Terdaftar				Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						

	dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota												
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran	Muara	Jumlah Persyaratan dan P	1	Doku	-	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukur	Muara	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang	1	Dokume	50,000,000	

	Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT		rosedur Penerbitan Rekomendasi				an Sampai Dengan 10 GT		Menjadi Kewenangan Kabupaten /Kota.				

			Bukukapalperikanan yangMenjad											

			iKewenangan Kabupaten/Kota.										

	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Muara	Jumlah Rekomendasi Bukukapal Perikan	1500	Reko	50,000,000	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT						Sub Kegiatan Mengalami Pemutakhiran berganti nama

			an (BKP) yang Diterbitkan.										
							Penerbitan rekomend	Muara	Jumlah Rekomendasi Buku		Rekome	100,000,000	Sub Kegiatan Baru Hasil Pemutakhirabn dari Sub

							asi Buku Kapal Perikanan (BKP)		Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				Kegiatan Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT

	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi Perikanan Budidi		Ton	29,726,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi Perikanan Budidaya		Ton	64,060,000,000	

			daya										
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah PCKDAKAN Bermitra		pokda	2,155,000,000	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah POKDAKAN Bermitra		pokdakan	4,705,000,000	
			Jumlah PCKDAK		pokda				Jumlah POKDAKAN Naik Kelas		pokdakan		

			Anak Kelas										
	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Wilaya	Jumlah Kelompok Pembudi	15	Kelom	455,000,000	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Wilaya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas.	15	Kelompo	455,000,000	

			ayaIkanKecilyangMengikutiPen										

			gembangan Kapasitas.										

	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan	Kecam	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil	100	Kelom	150,000,000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kecam	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan.	50	Kelompo	250,000,000	

	Kecil		lyangMengikutiPembentukandan										

			Pengembangan Kelembagaan.										

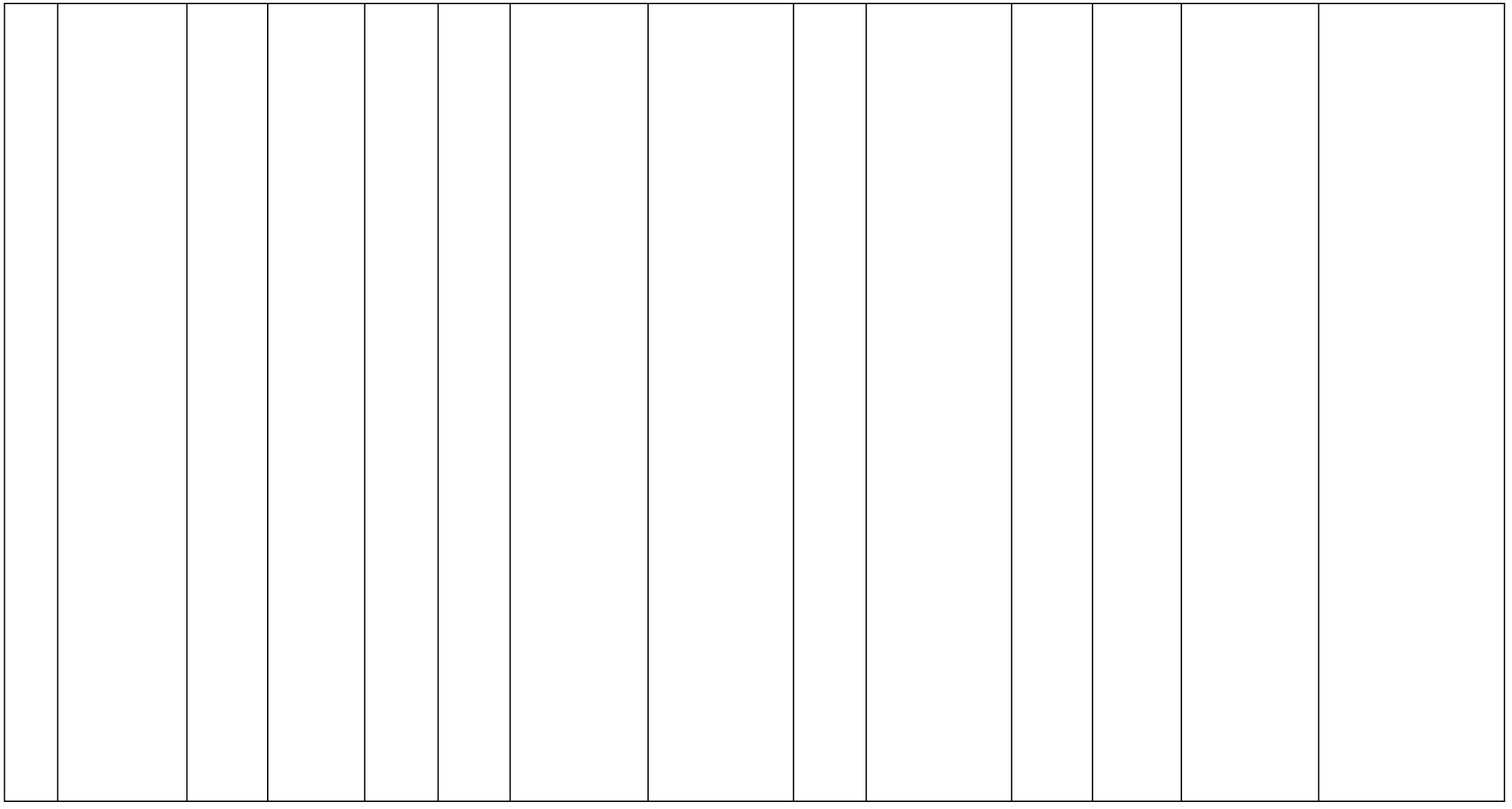

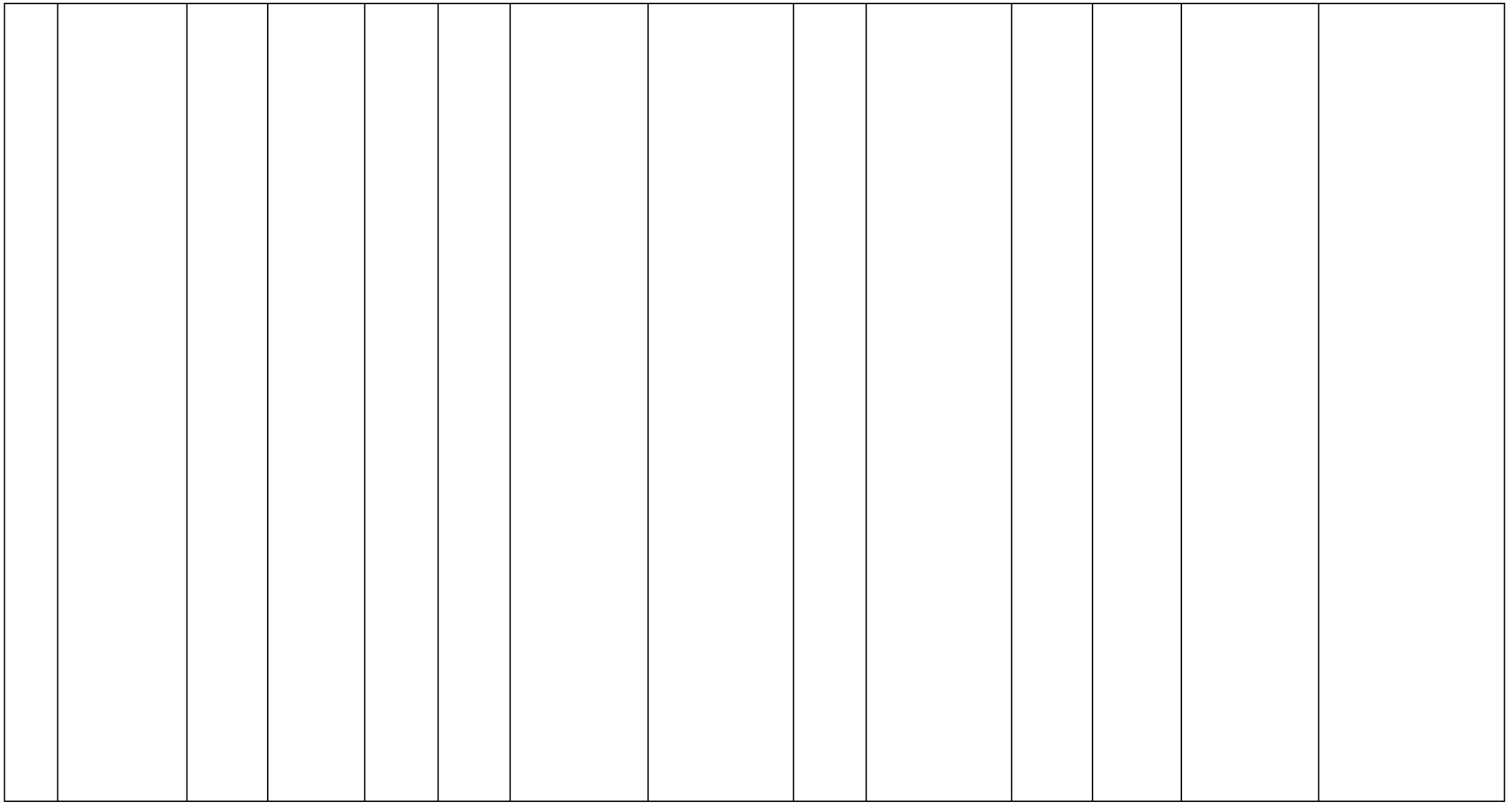

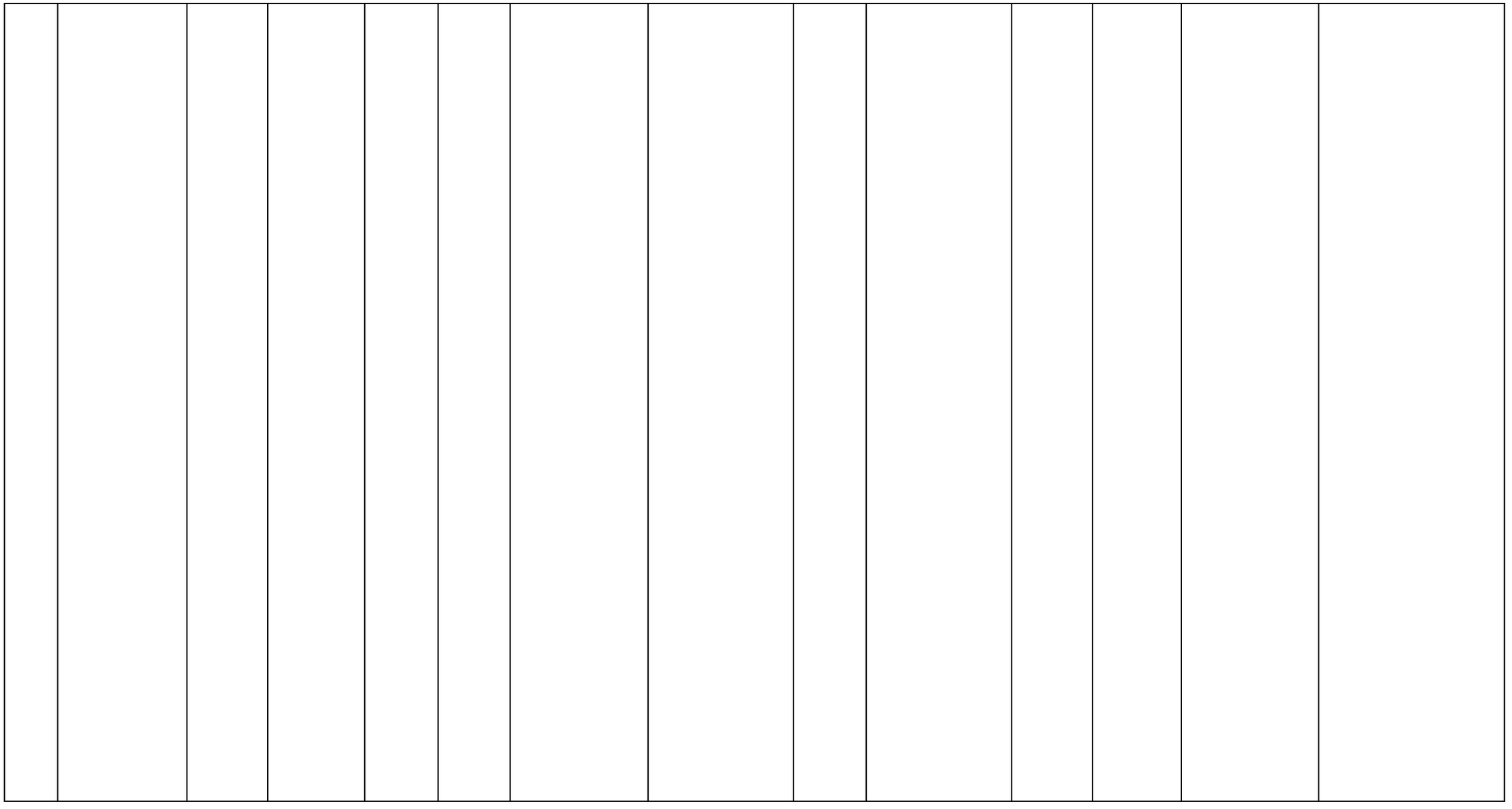

	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kecam	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi	30	Kelom	200,000,000	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kecam	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	100	Kelompo	1,000,000	Untuk memfasilitasi Rembuk Pembudidaya Ikan (Pertemuan Penyuluh Swadaya, Pembudidaya Ikan, Pengusaha dan Lembaga Pembiayaan, KTNA)

			asi Bantuan Pendanaan, Bantuan P										

			embiayaan, Kemitraan Usahanya										

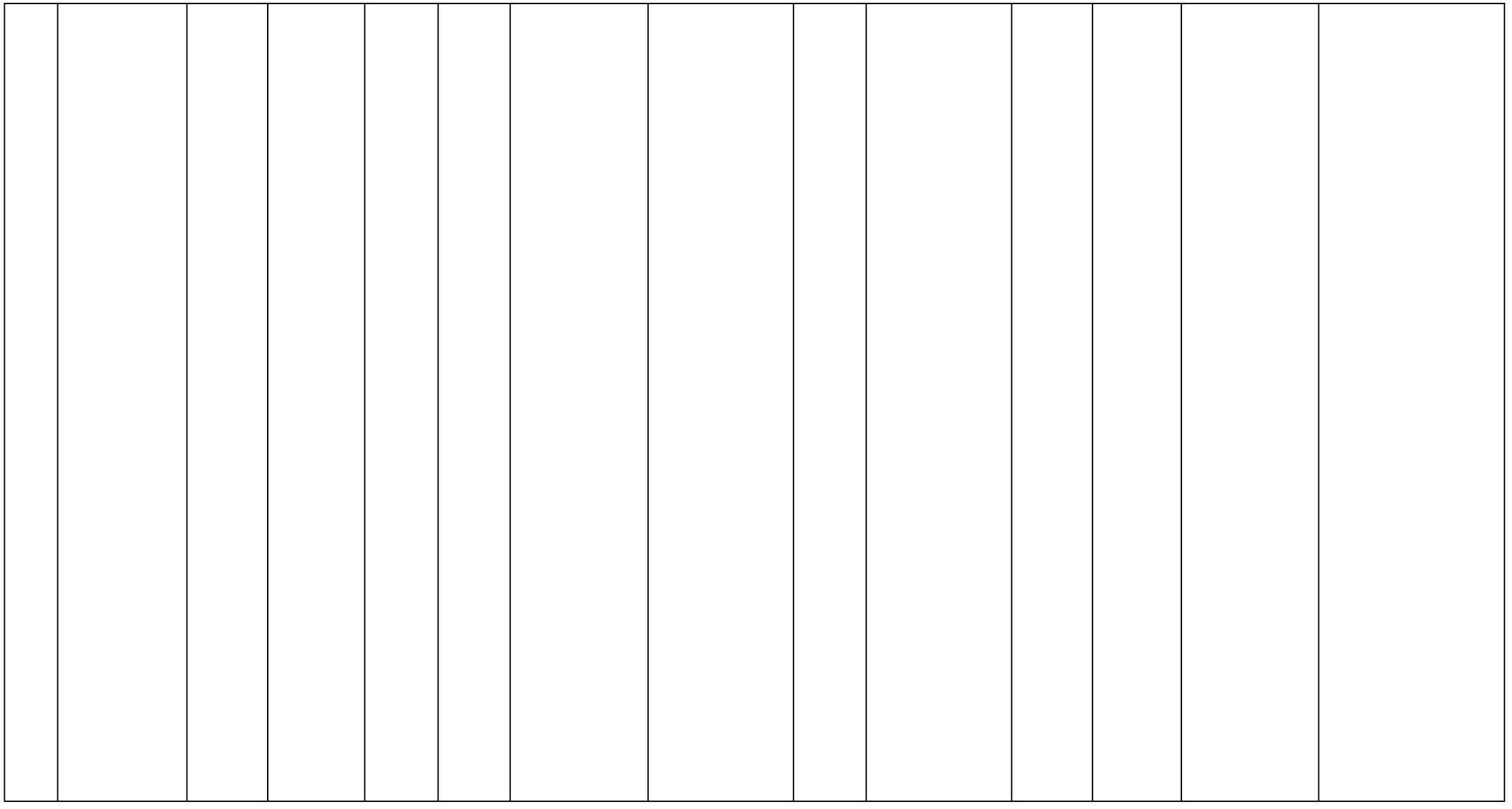

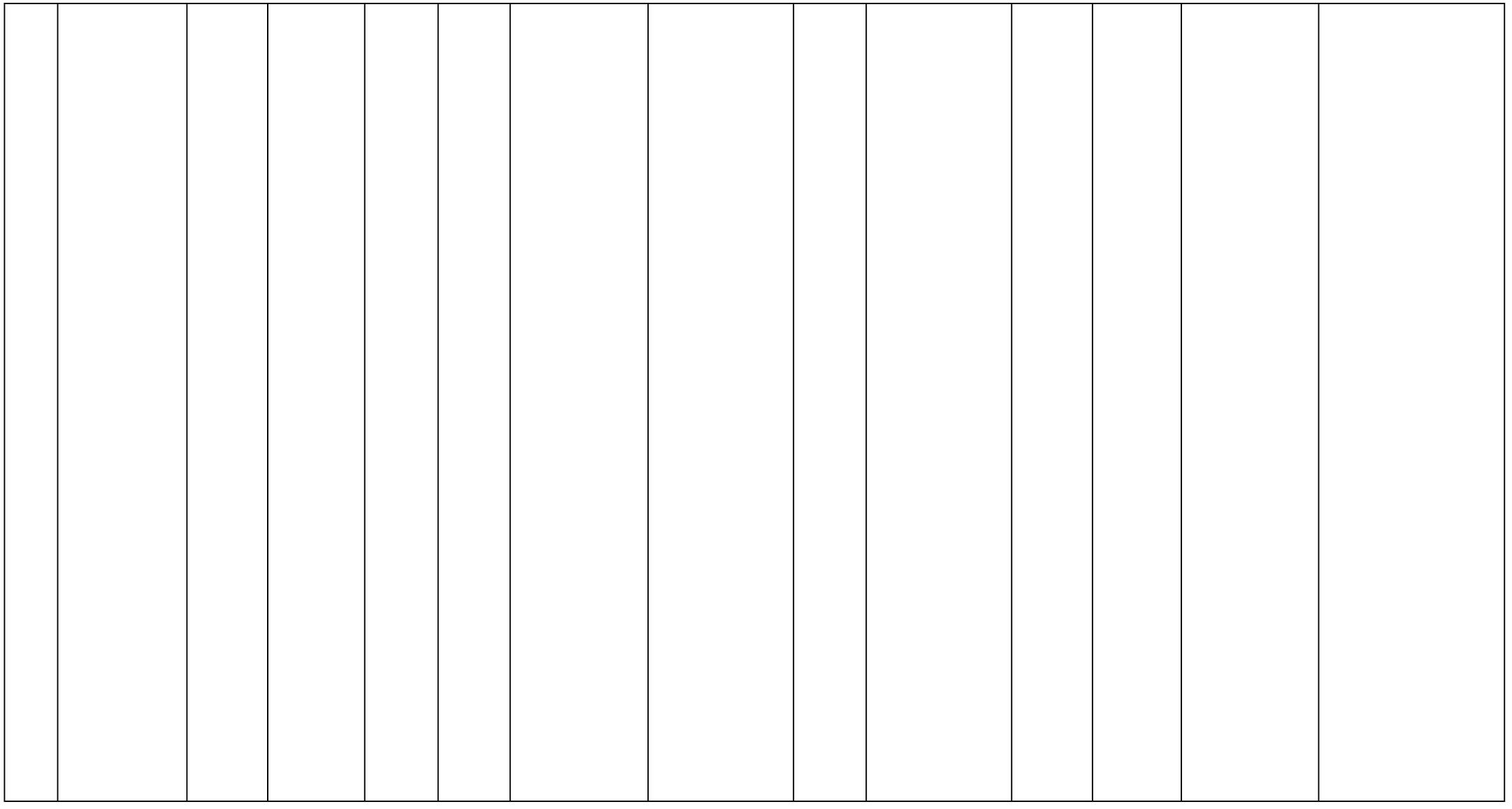

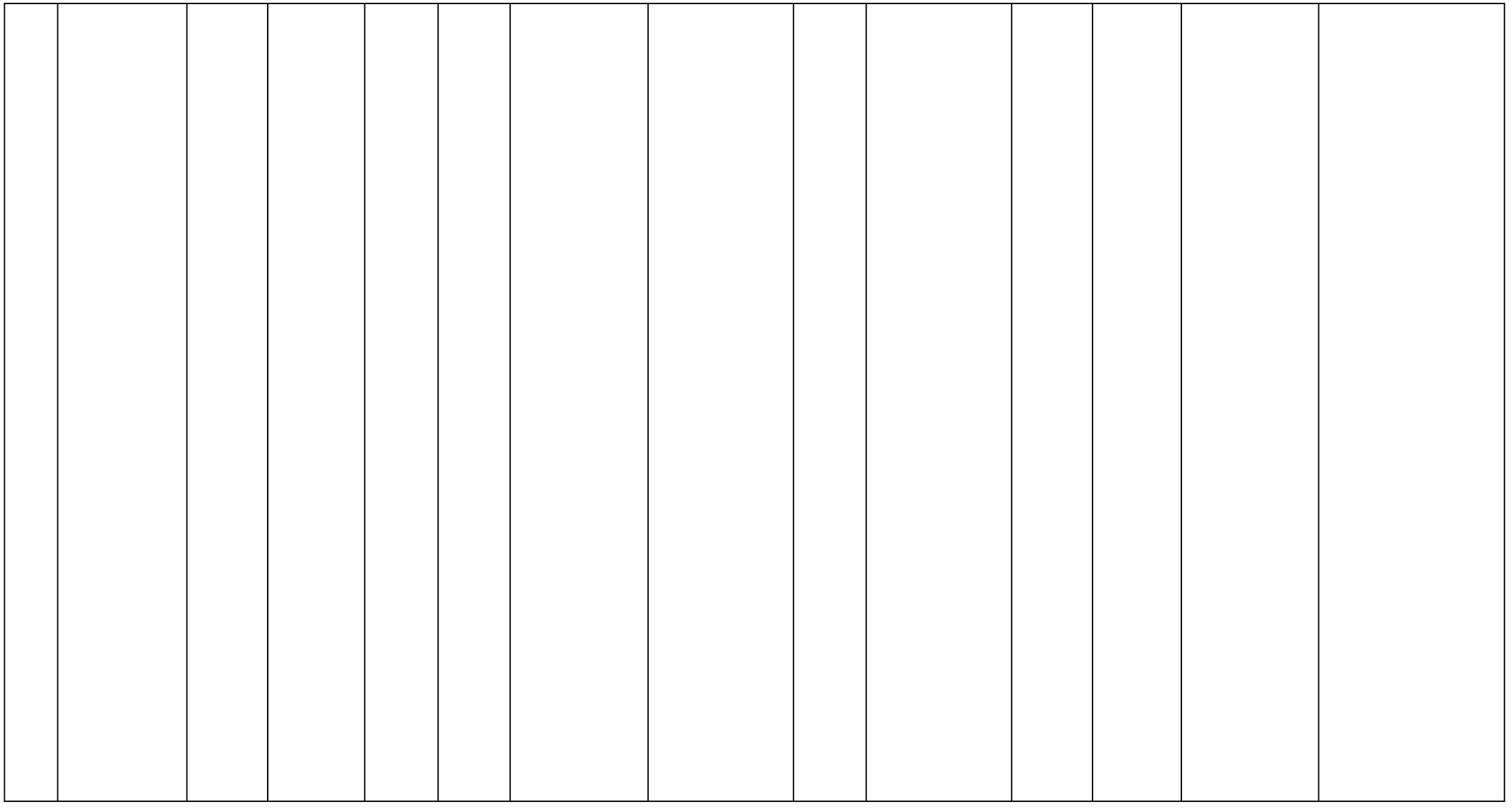

	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi	Kecam	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	30	Kelom	1,35 0,00 0,00 0	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kecam	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan	500	Kelompo	3,00 0,00 0,00 0	Rencana Priritas OPD : Peningkatan Produksi dan Produktivitas serta Nilai Tambah Sektor Perikanan (Pelatihan dan Pendampingan SDM dan Kelembagaan)

	si, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Pendampingan, Kemudahan Akse						Pendidikan dan Pelatihan				

			sIlmuPengetahuan,Teknologida										

			nInformasi, Sertapenyelenggar										

			aanPendidikandanPelatihan										

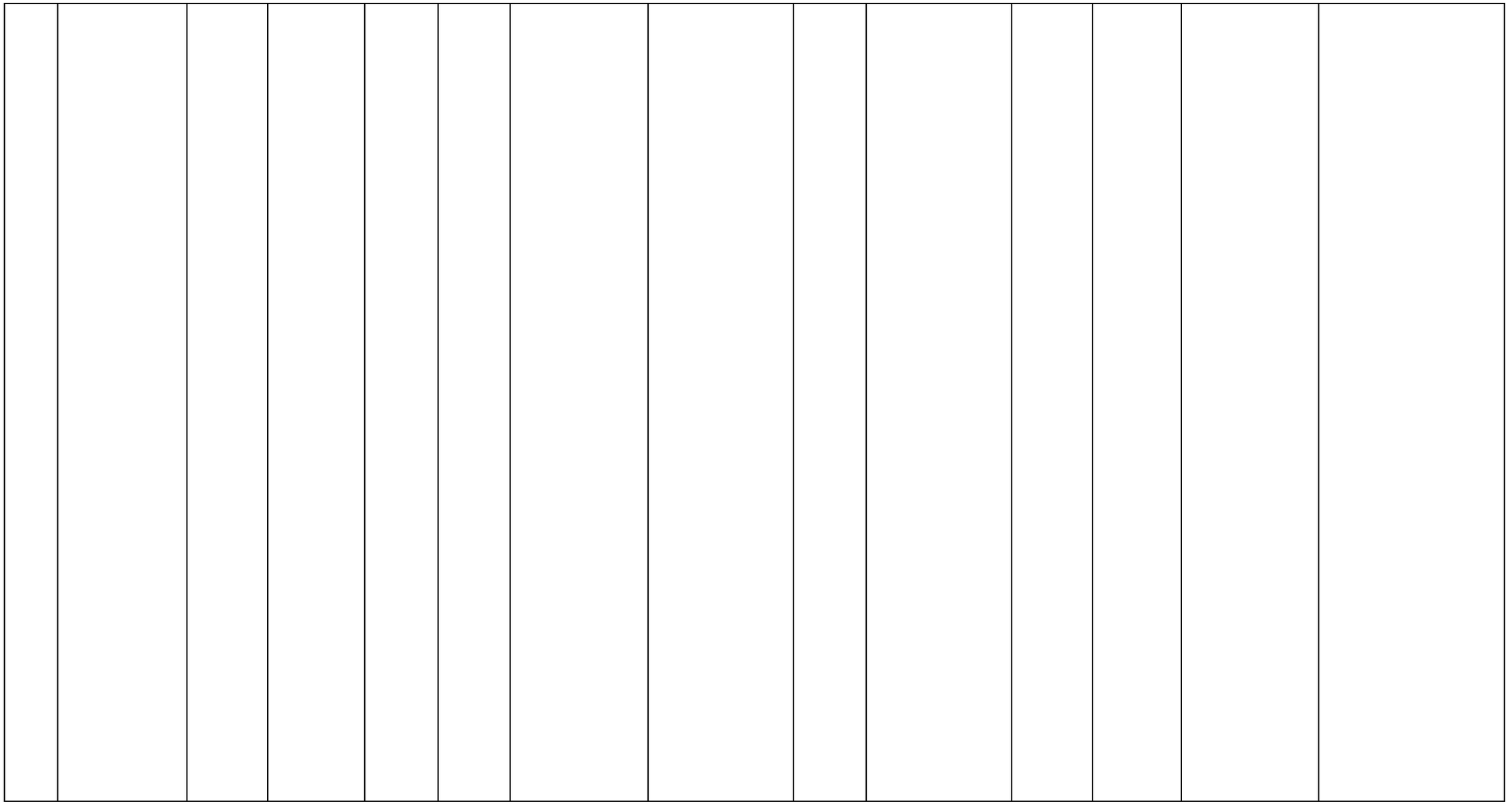

	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TD		Jumlah Tanda Daftar Pemb	1000	TDPI	200,000,000	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah		Jumlah Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Diterbitkan	1000	TDPI	200,000,000	

	PIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten /kota		udidayaIkanDitetapkan				kabupaten/kota							
	Penetapan persya	Kecam	Jumlah Rekom	100	Reko	-	Penetapan persyaratan dan	Kecam	Jumlah Rekomendasi Persyarata	100	Rekome	-		

	rata n dan pro sed ur pen erbi tan Tan da Daf tar bagi Pe mb udi day aan Ika n Keci l (TD PIK) dal am 1		e n d a s i P e r s y a r a t a n d a n P r o s e d u r				prose dur pener bitan Tanda Dafta r bagi Pemb udida yaan Ikan Kecil (TDPI K) dalam 1 (satu) daera h kabu paten /kota		n dan Prose dur Perizi nan Berus aha Skala Mikro dan Kecil bagi Pemb udida yaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daera h Kabu paten /Kota yang Diteta pkan.				

	(satu) daerah kabupaten/kota		Perizinan Berusaha Skala Mikro d										

			anKecilbagiPembudidayaanIkan										

			Kecildalam1(Satu)DaerahKabup										

			aten/KotayangDitetapkan.										

	Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu)	Kecam	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusah	1000	Reko	200,000,000	Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kecam	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten /Kota	1000	Rekome	200,000,000	

	daerah kabupaten /kota		abagi Pembudi Dayaan Ikan Kecily										

			angMenjadiKewenangan Kabupate										

			n/Kota										

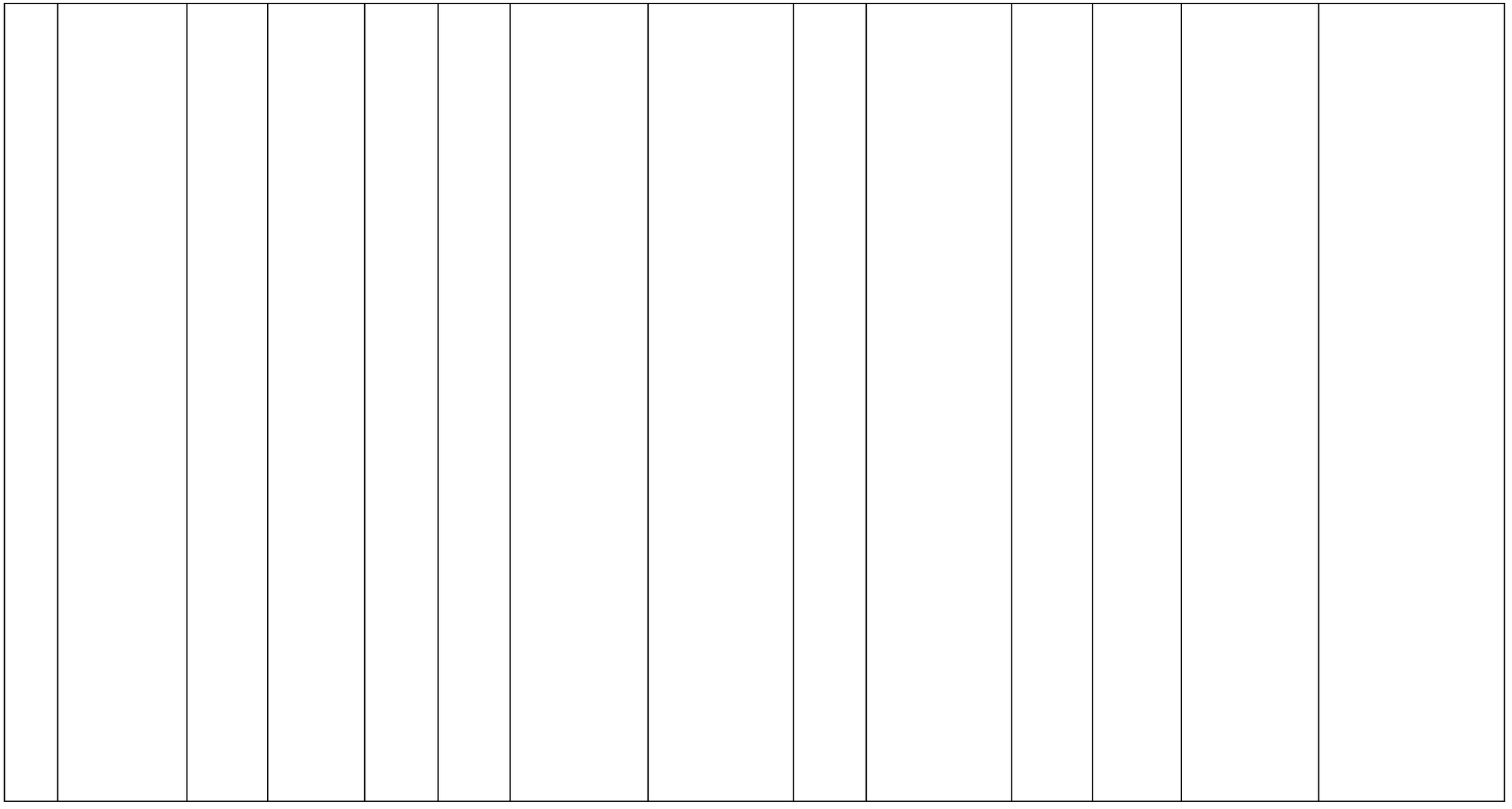

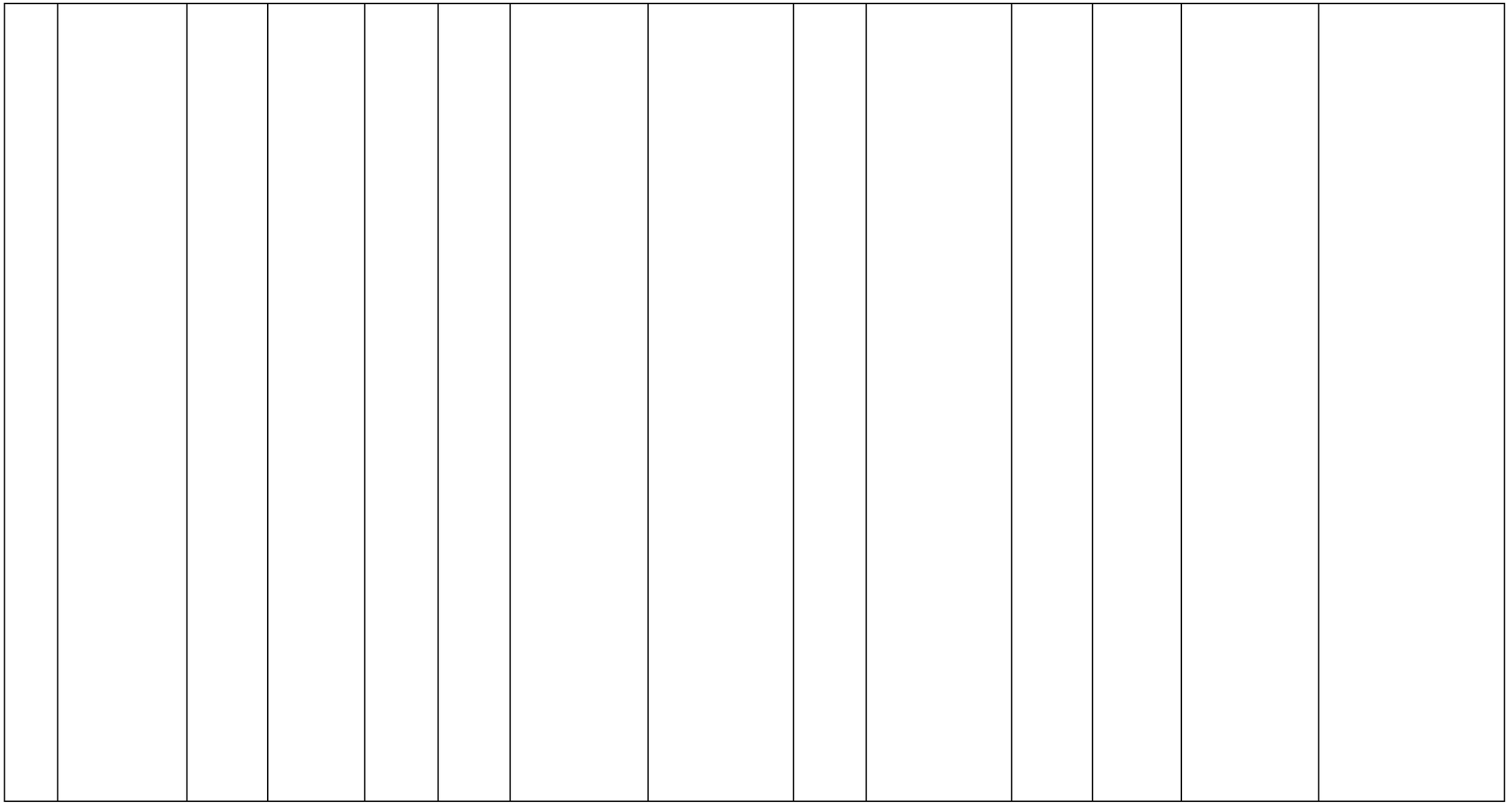

	Pengelolaan Pembudi		Jumlah Pem	1908	Pemb	27,3 71,0	Pengelolaan Pembudida		Jumlah Pembudida ya	2078	Pembud i a	59,1 55,0	

	day aan Ika n		b u d i d a y a I k a n T e r f a s i l i t a s i S a r			00,0 00	yaan Ikan		Ikan Terfas ilitasi Saran a dan Prasa rana Budid aya Ikan.			00,0 00	

			anadanPrasaranaBudidayaIkan.										

	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Di	Jumlah Data dan Informasi Pembudidaya	1	Doku	100,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Di	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokume	150,000,000	Peningkatan Kualitas Data Statistik Budidaya.

	/Kota		anIkandalam1(Satu)DaerahKabu										

			paten/Kota										
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Sat	Desa	Jumlah Prasarana Pembudid	45	Unit	5,950,000,000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Desa	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	27	Unit	33,500,000,000	Pembangunan / Rehab UPR/HSRT. (Pemenuhan Target Renstra)

	u) Daerah Kabupaten /Kota		ayaan Ikand alam1 (Satu) Daerah K										

			abupaten/Kota										

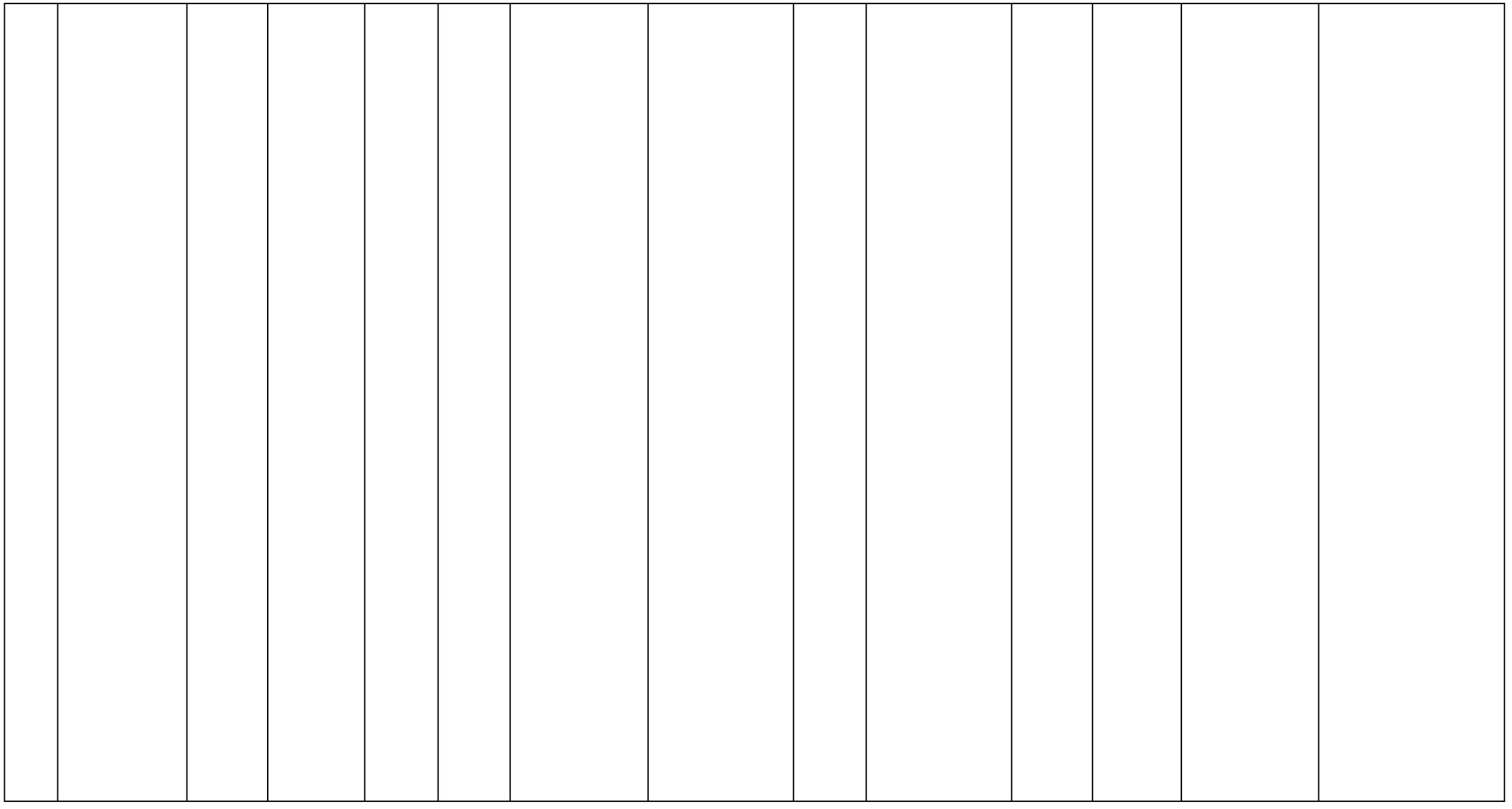

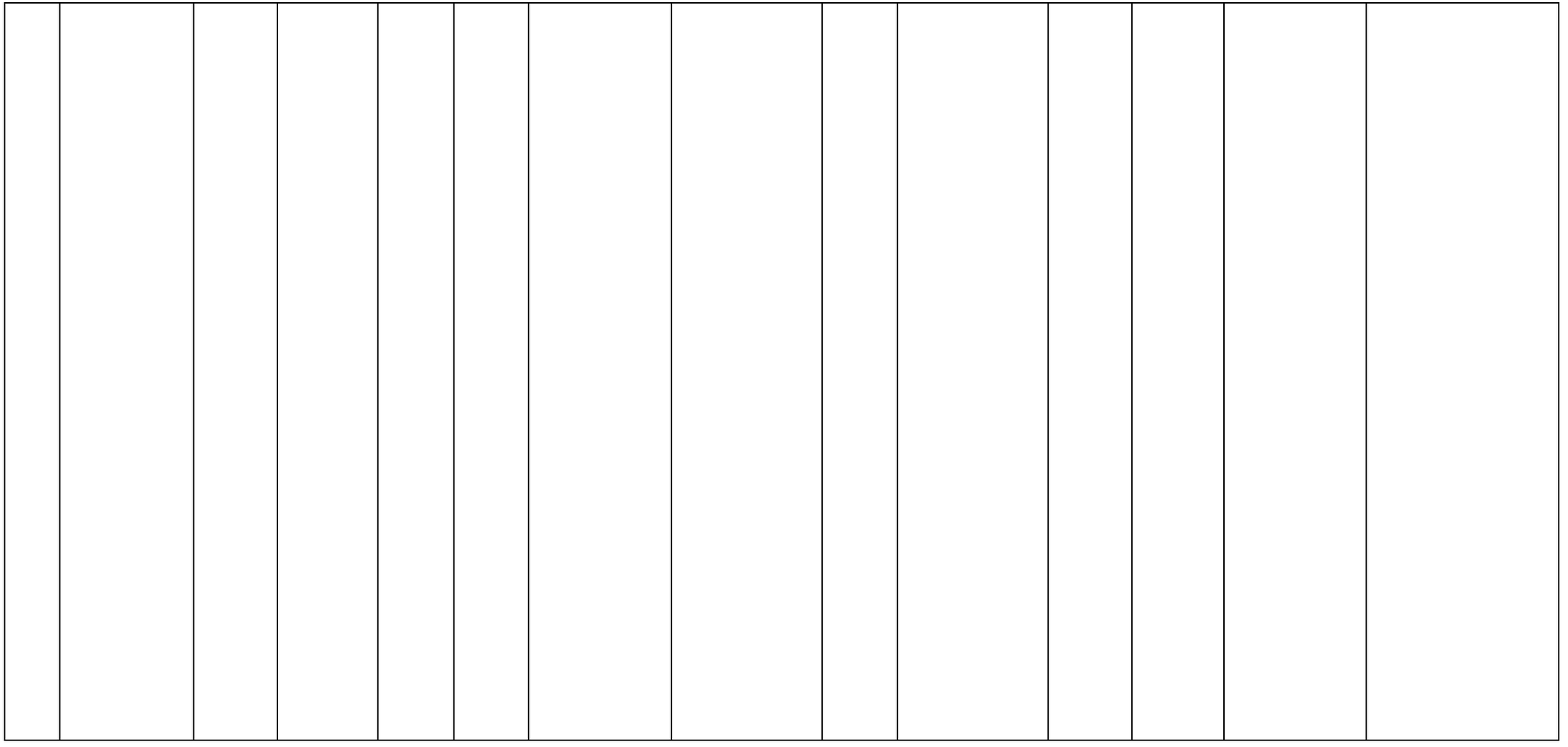

	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	samboj	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam Satu Daerah Kabupaten	2350	Unit	21,121,000,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	sambo	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	981330	Unit	25,305,000,000	Peningkatan Produksi dalam rangka menyambut IKN dan Pengembangan Budidaya Kerang Dara dan Vanamae

	/Kota		m1(Satu)DaerahKabupaten/Kota										

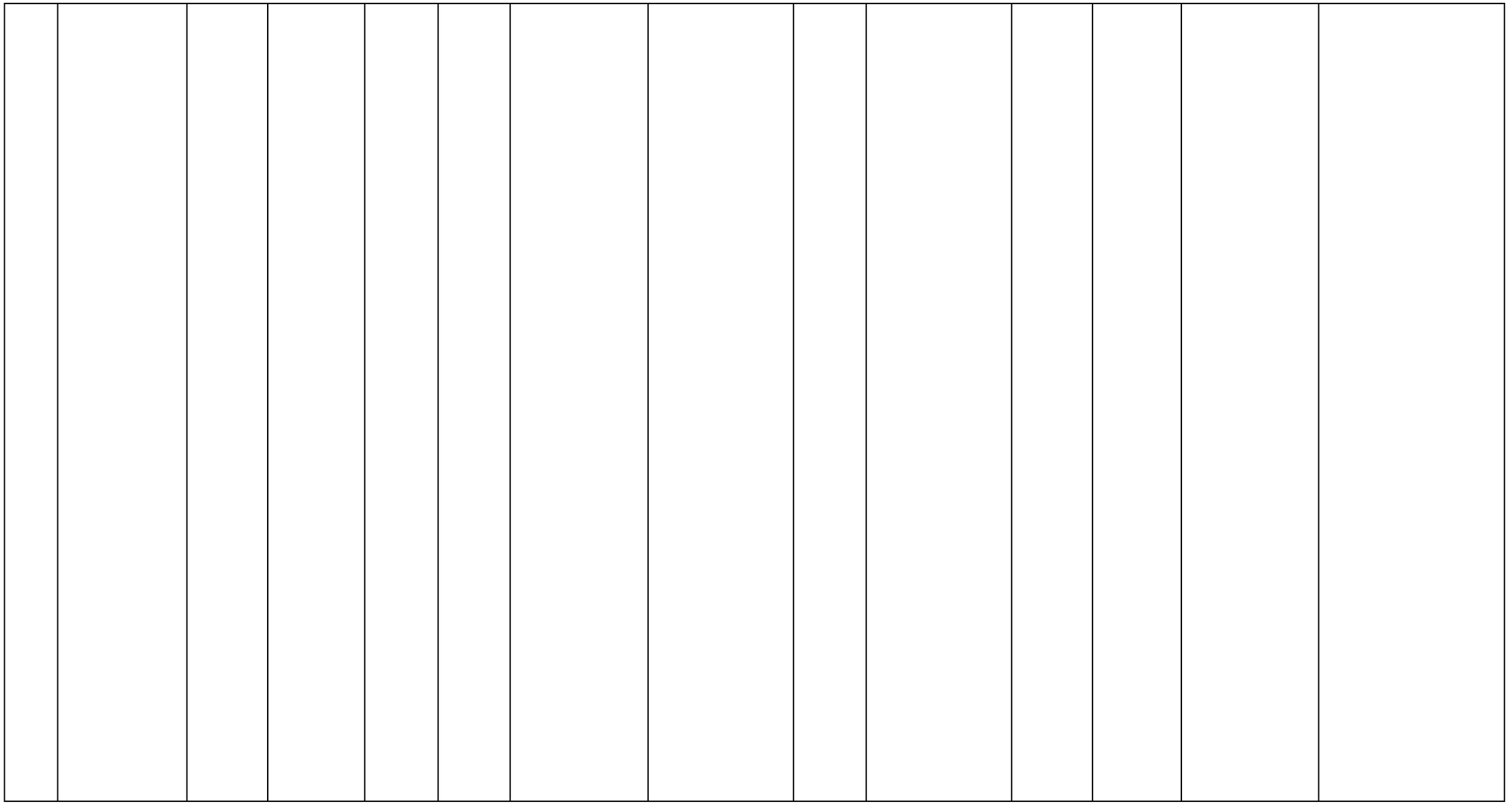

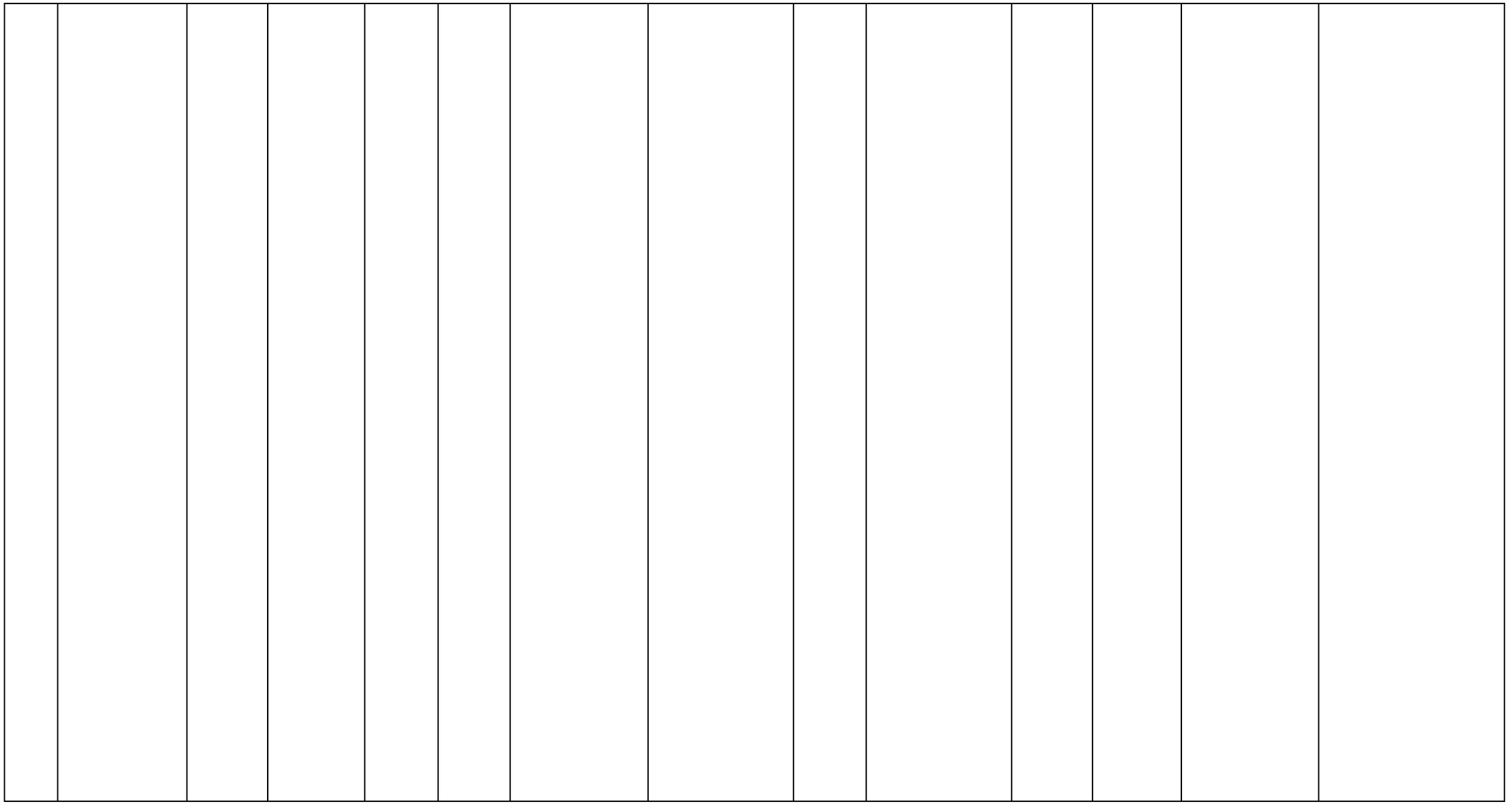

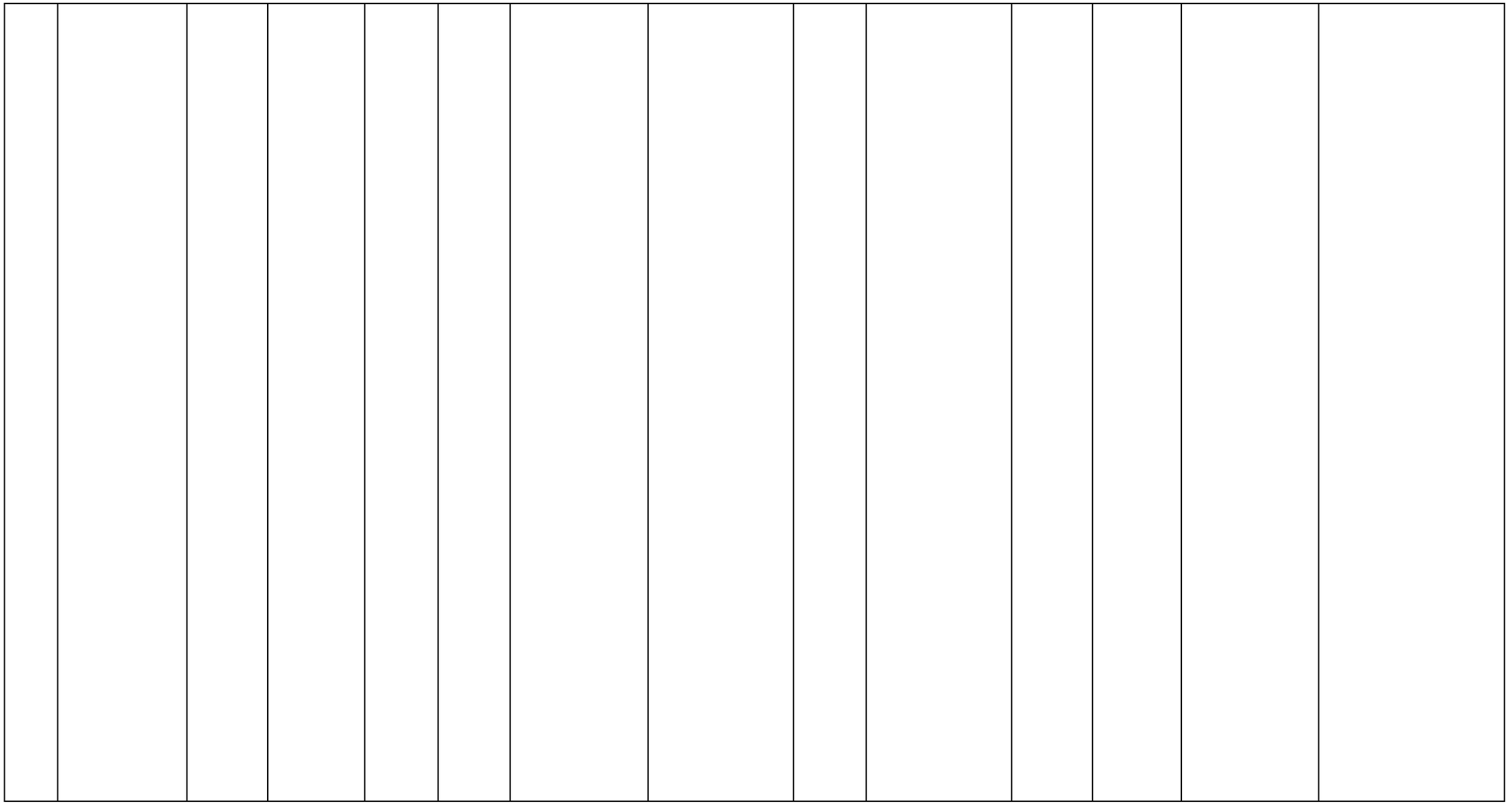

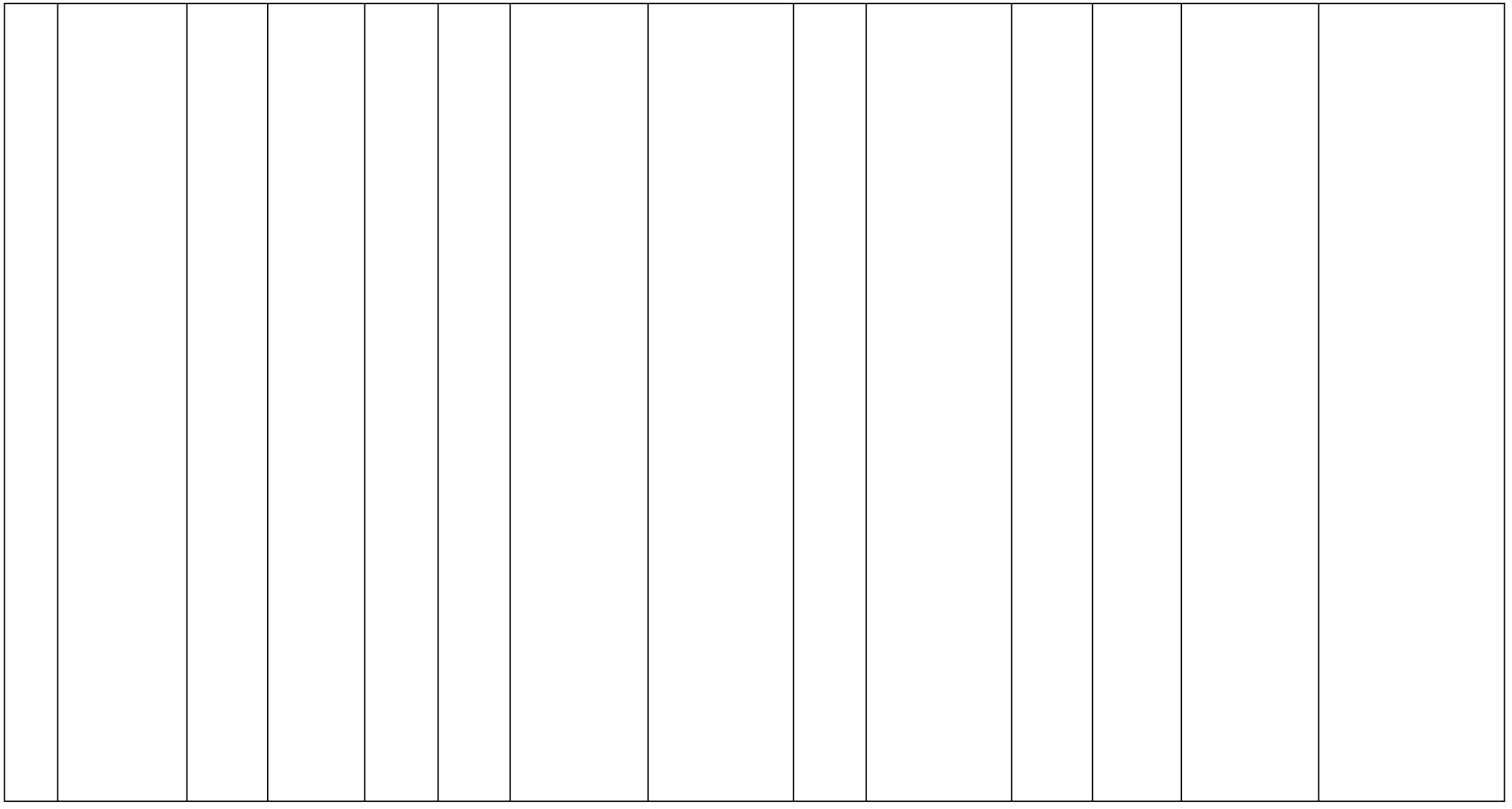

	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkunga	Kec.	Jumlah Hasil Ikan dan	1	Doku	200,000,000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkunga n Budidaya dalam	Kec.	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkunga n Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah	1	Dokume	200,000,000	

	n Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota		Lingkungan Budidaya dalam 1 (Sat				1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota		Kabupaten /Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				

			u)DaerahKabupaten/KotayangTe										

			rujiMelaluiPengelolaanKesehatan										

			tanIkan										
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat.	Wilaya	Jumlah Pembudidayang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat.			-	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat.	Wilaya	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat.		Orang	-	

			rolehPembinaandanPemantauanP										

			embudidayaanIkandiDarat.											
	Perencanaan	Wilaya	Luas Lah		Ha.	-	Perencanaan,	Wilaya	Luas Lahan untuk Pembudida	0	Ha.	-		

	n, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di		anuntuk Pembudidayaan Ikan di Da				Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		yaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi.				

	Darat		ratyangDirencanakan, Dikembangkan										

			gkan, Dimanfaatkandan Dilindun										

			gi.										
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		CAKUPAN WILAYAH SUMBERDAYA PERIKANAN		Kecam	5,500,000,000	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		CAKUPAN WILAYAH SUMBERDAYA PERIKANAN YANG DIAWASI		Kecamat	12,000,000,000	

			NANYANGDIAWASI										
			PERSEN TASEKASUSILEG		Persen				PERSENTASE KASUS ILEGAL DAN DESTRUKTIF FISHING YANG DITU		Persen		

			ALDANDESTRUKTIFFISHINGYANGDI						NTASKAN.					

			TUNTASKAN.										
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Wa		Jumlah Kelompok Masyaraka		POKM	5,500,000,000	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Gena		Jumlah Kelompok Masyaraka t Pengawas (POKMAS WAS) yang Difasilitasi		POKMA	12,000,000,00

	duk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		tPengawas (PCKMASWAS) yang Difa				ngan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota						

			silitasi										
			Jumlah Reservat Diawasi	3	Reserv				Jumlah Reservat Diawasi	3	Reservat		
			Jumlah Nel	400	Nelaya				Jumlah Nelayan Mend	500	Nelayan		

			ayanMendapatkanAlatTangkapRa						apatkan Alat Tangkap Ramah Lingkungan					

			nah Lingkungan											
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah	Kecam	Jumlah Dokumen Hasil Pe	1	Doku	5,400,000,000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Dana	Kecam	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilay				Sub Keg menghalami Pemutakhiran berganti nama	

	Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kab		ngawasan Sumber Daya Perikanan T				u, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten /Kota		ah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten /Kota.			

	upaten/Kota		angkapdiWilayahSungai, Danau,										

			Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lai										

			nnyayangDapatDiusahakandalam										

			Kabupaten/Kota.										
							Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkut	Kecam	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesua	100	Pelaku	11,900,000,000	Sub Kegiatan Baru Hasil Pemutakhirabn dari Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau,

							an ikan sesuai kewenangan kabupaten /kota		i kewenangan kabupaten /kota				Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten /Kota

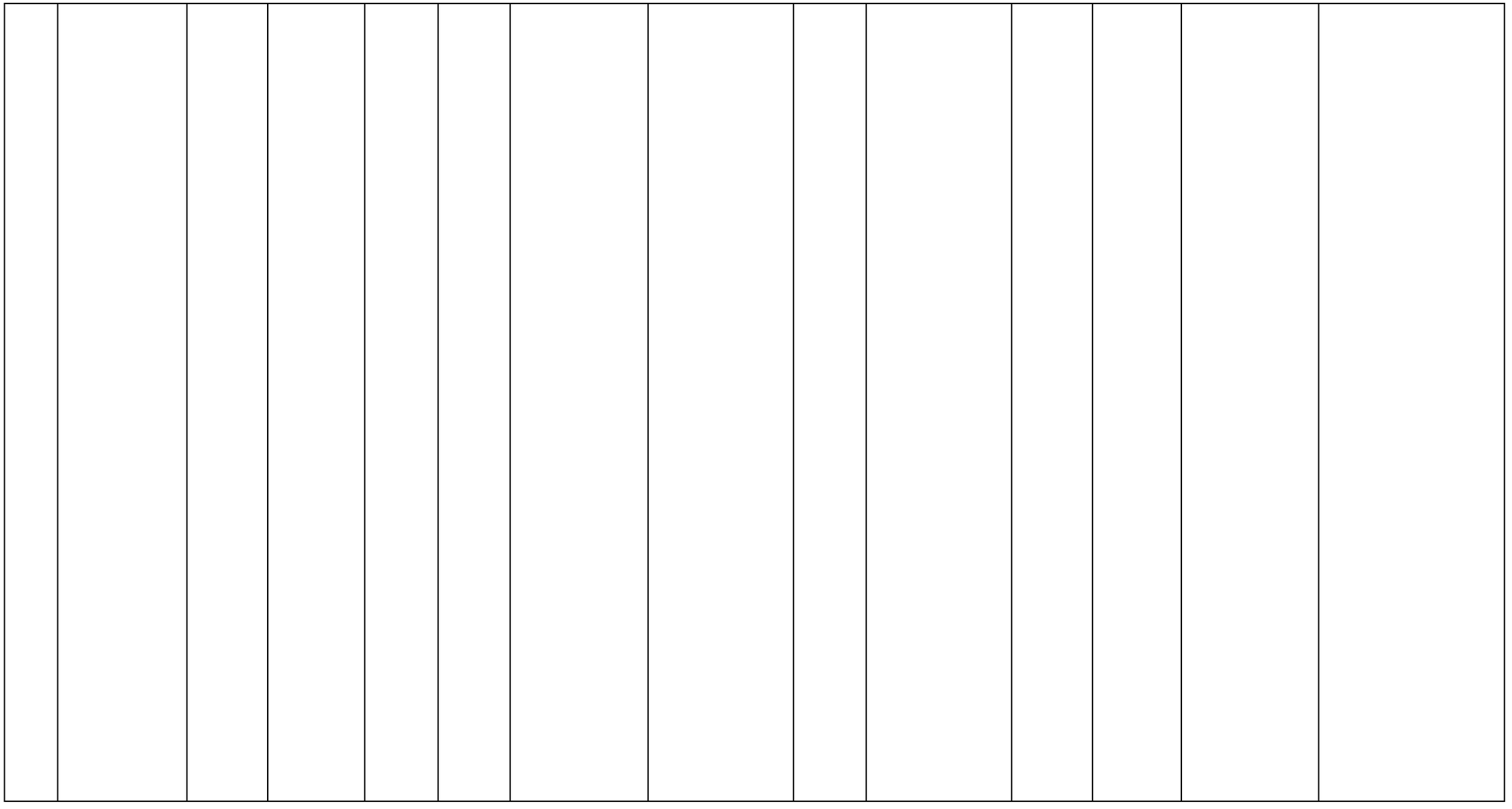

	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudiday	Kecam	Jumlah Dokumen Hasil Pe	1	Doku	100,000,000	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di	Kecam	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudida				Sub Keg menghalami Pemutakhiran berganti nama

	aan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diu		ngawasan Usaha Perikanan Bidang				Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten /Kota		yaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten /Kota.			

	sahakan dalam Kabupaten/Kota		Pembudidayaan Ikan di Wilayah Su										

			ngai, Dannau, Wadduk, Rawa, dan Gen										

			angan Air Lainnya yang Dapat Dius										

			ahakandalamKabupaten/Kota.										

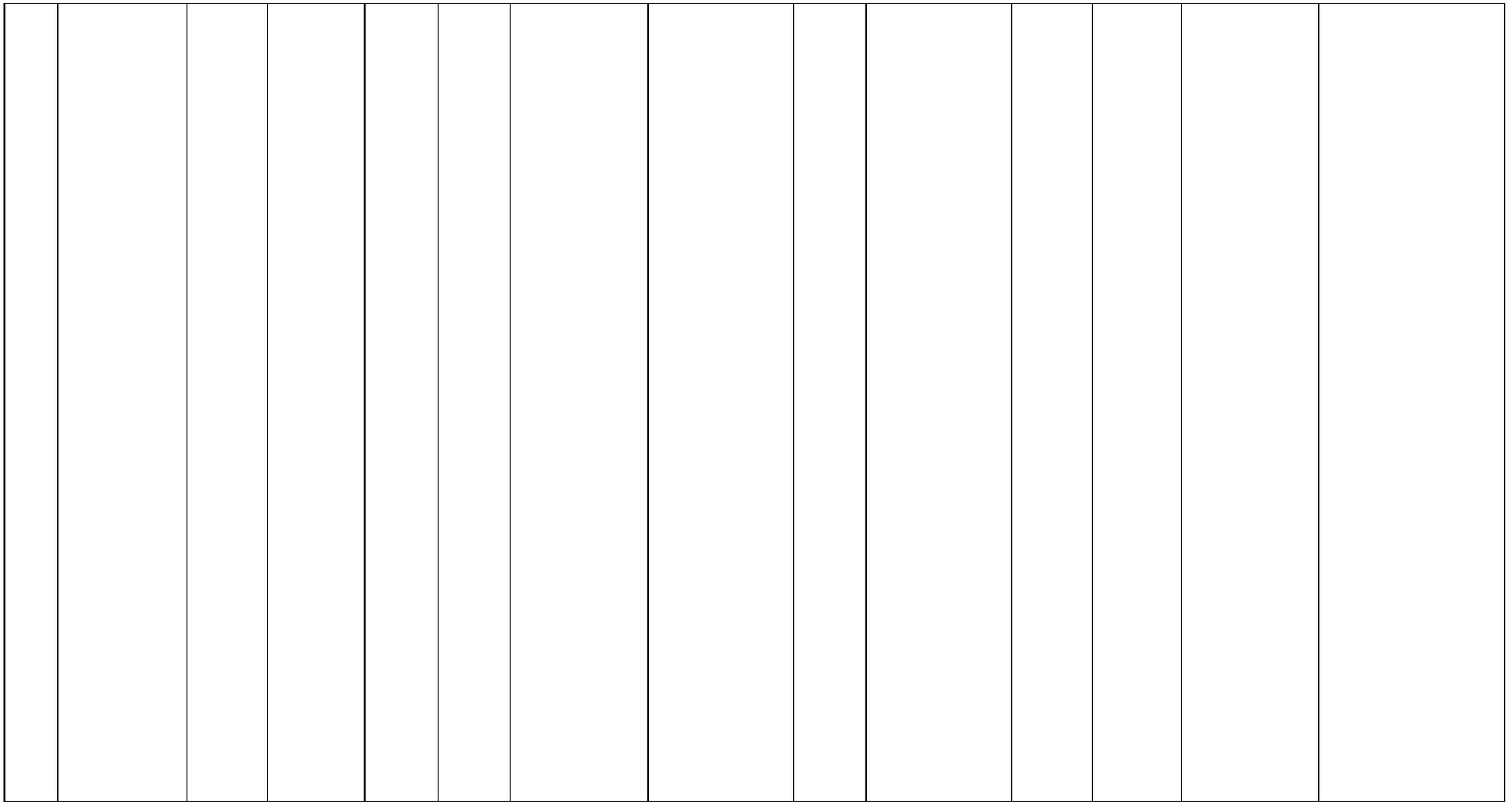

							Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabu	Kecam	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewe	10	Pelaku	100,000,000	Sub Kegiatan Baru Hasil Pemutakhiran dari Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan

							paten /kota		nangan kabu paten /kota				Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten /Kota

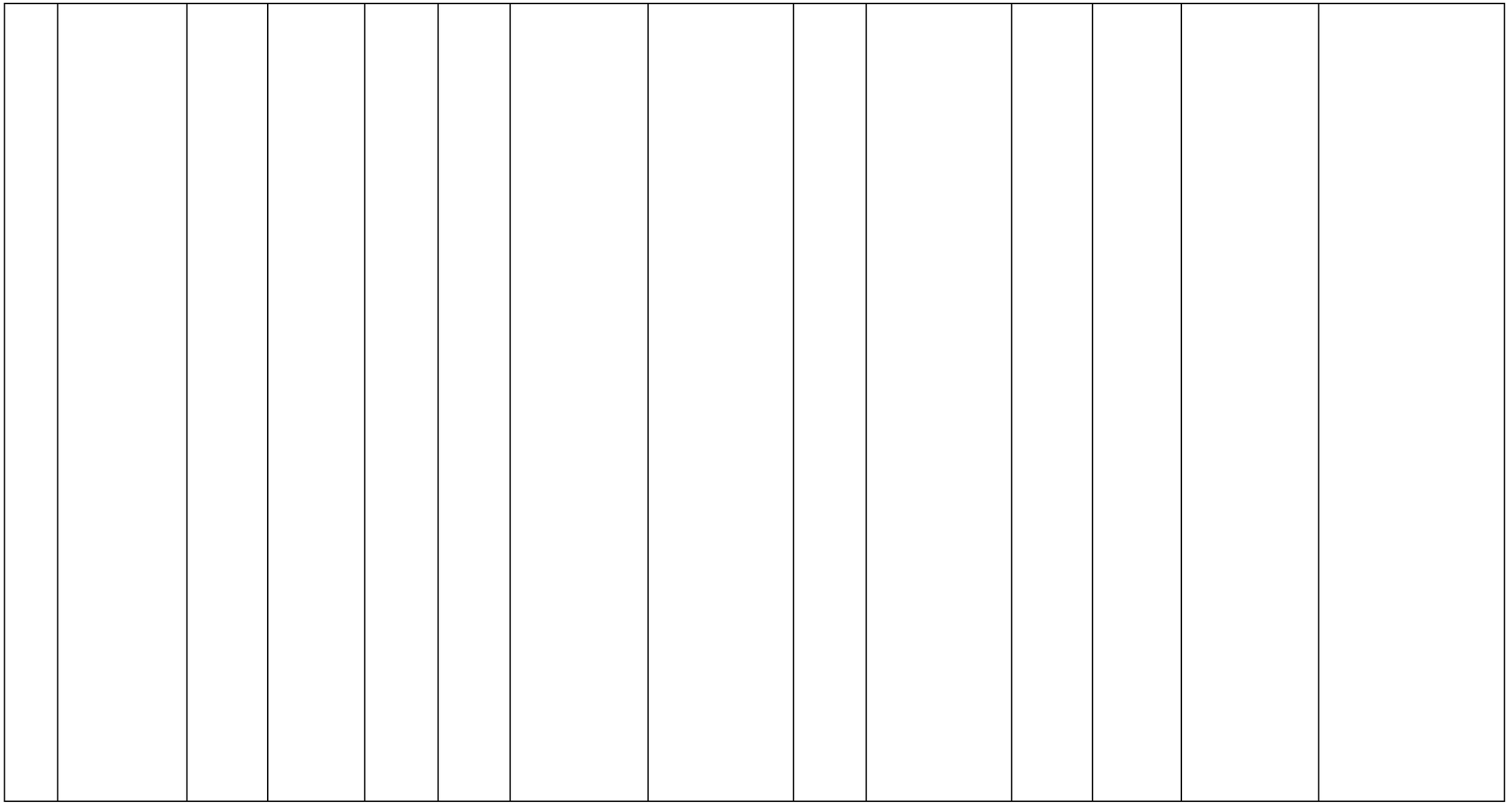

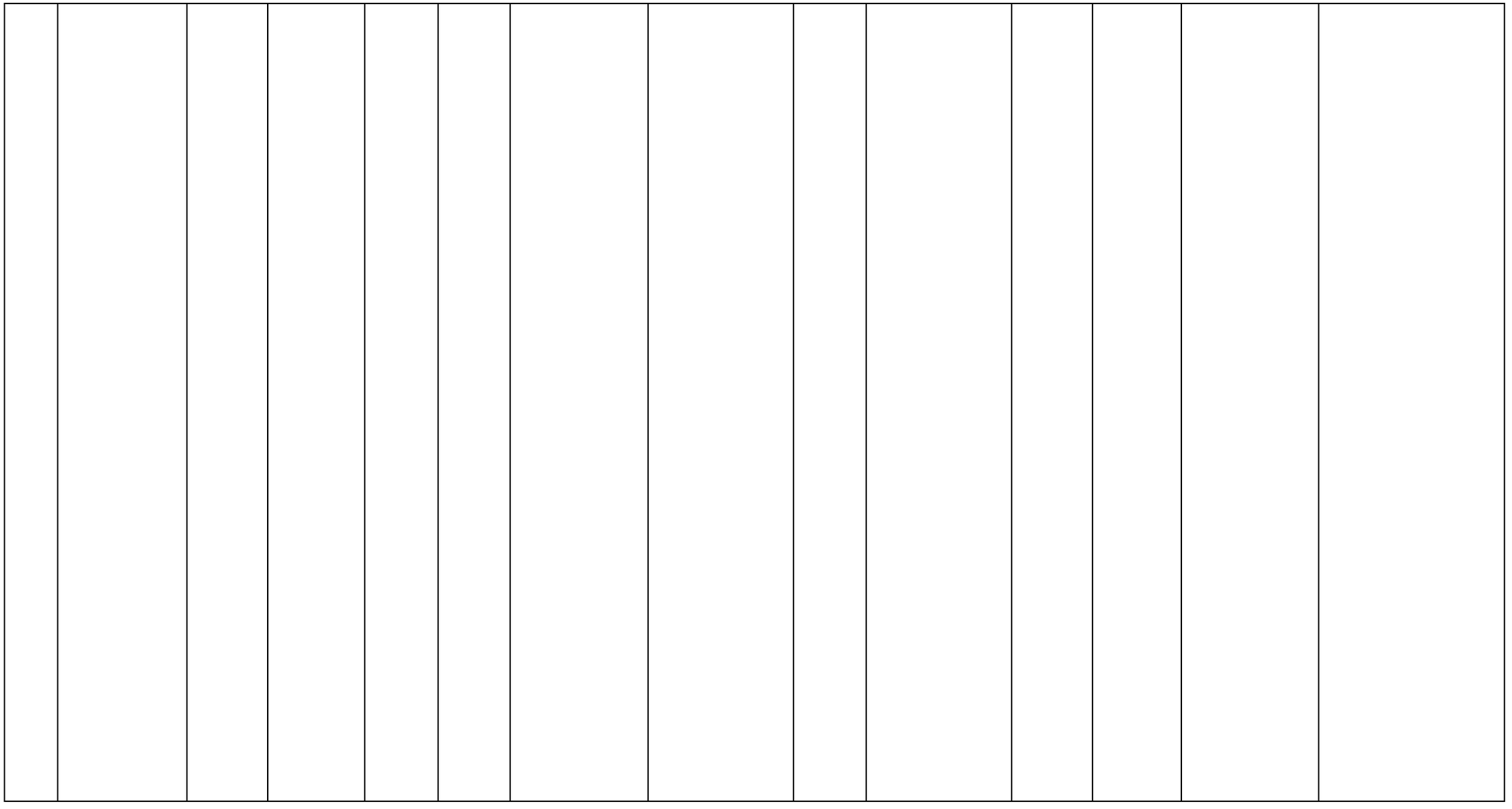

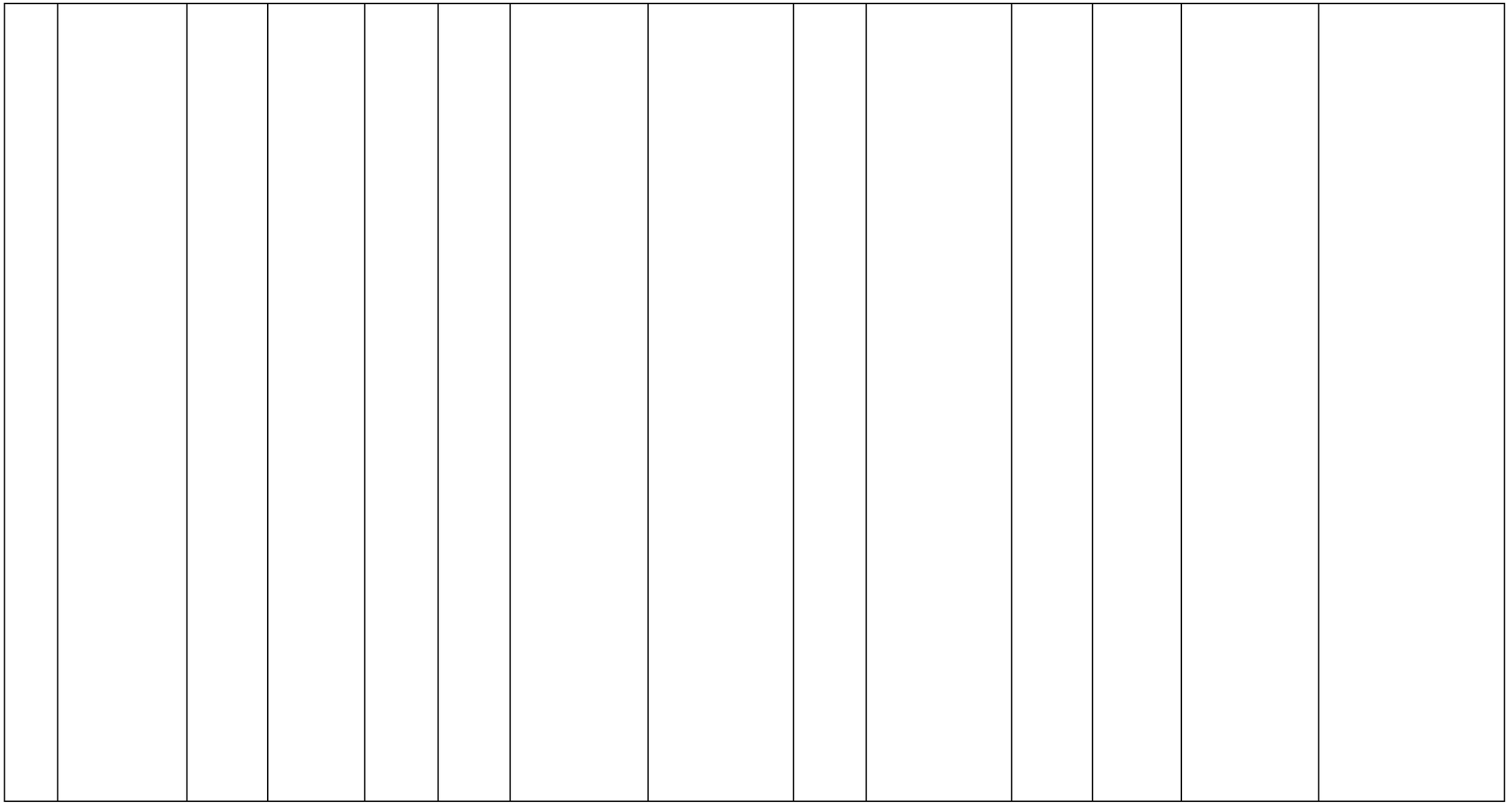

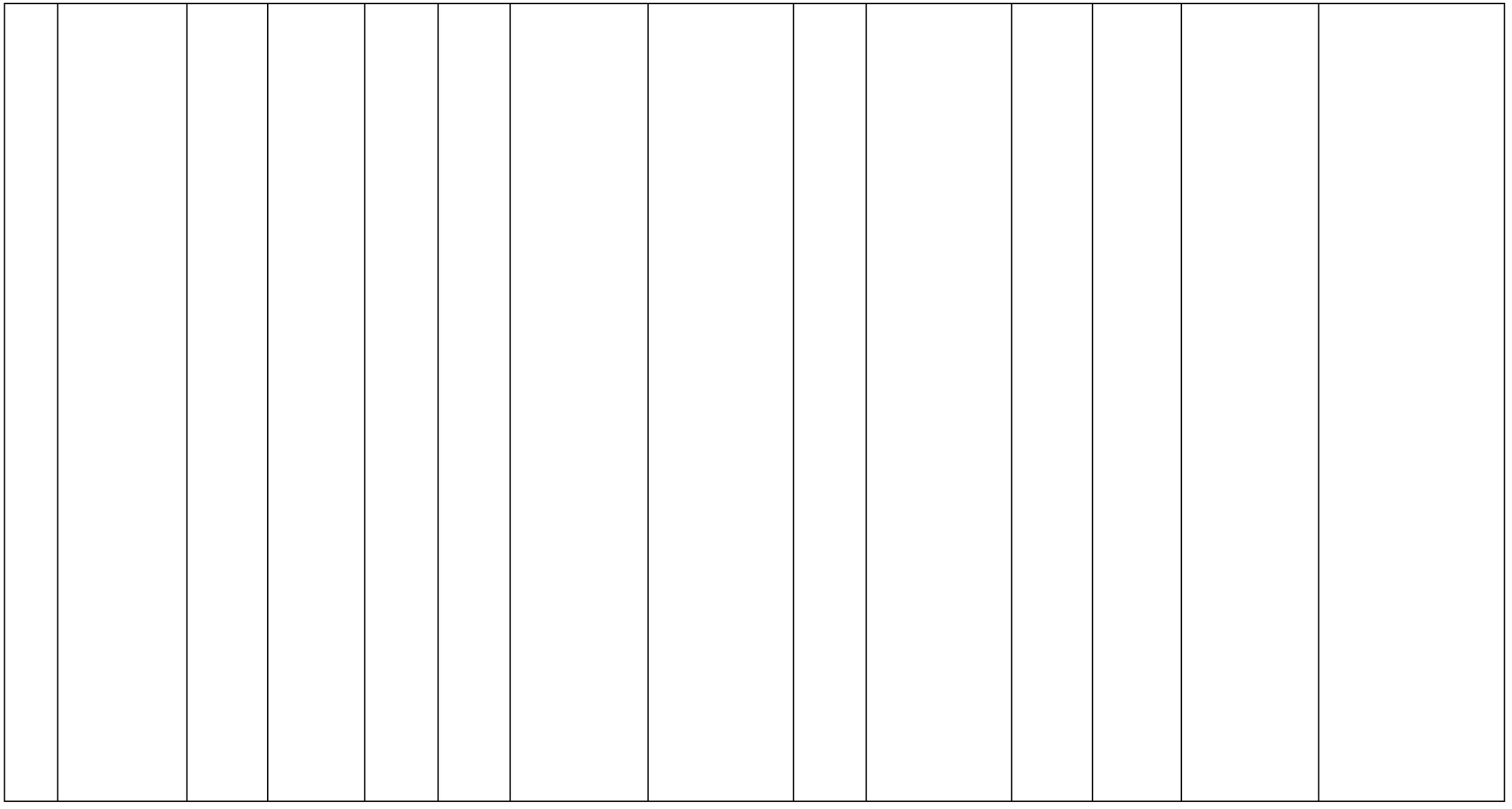

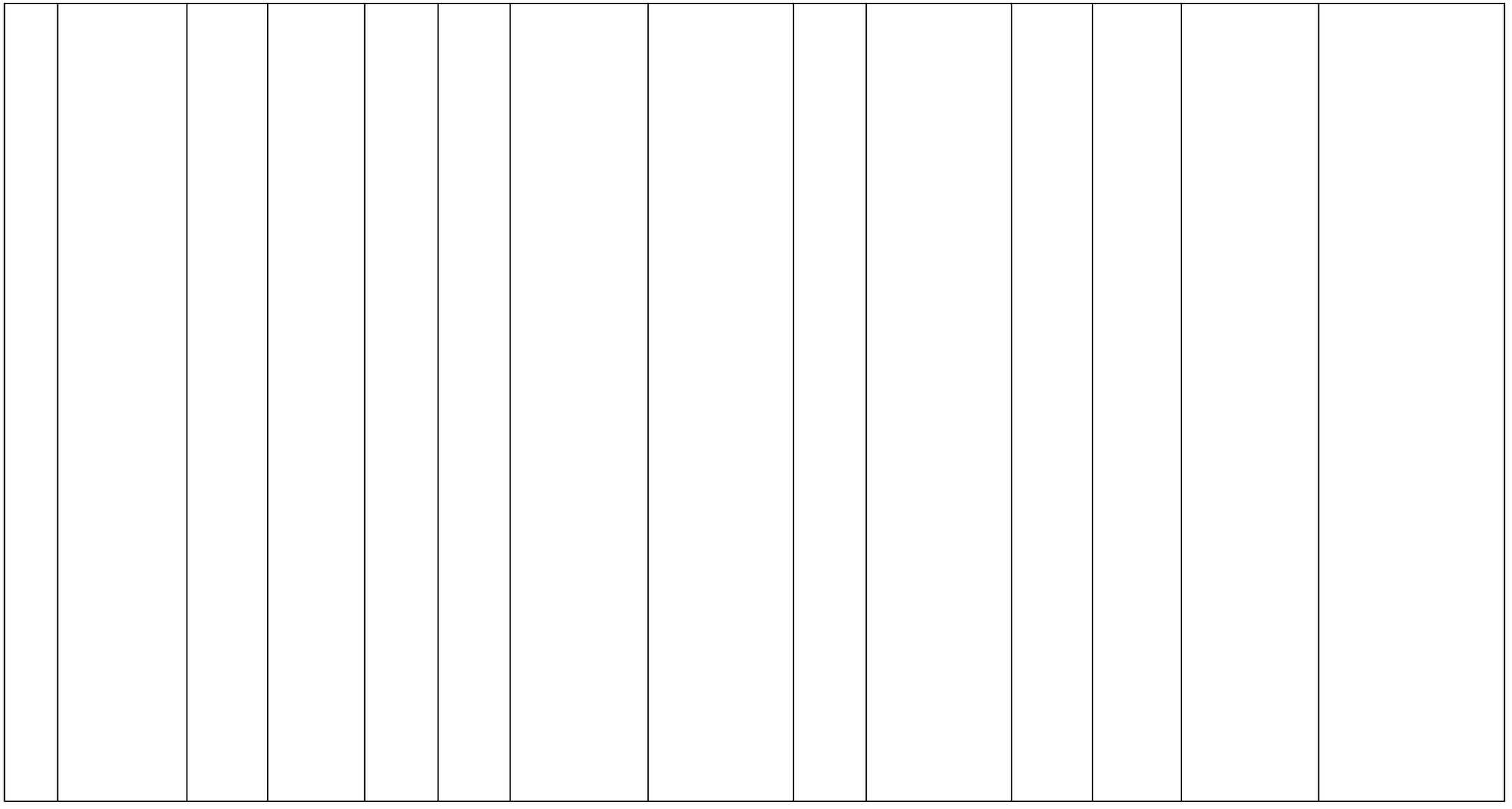

	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERI		Produksi Pengolahan Hasil		Ton	1,900,000,000	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Produksi Pengolahan Hasil Perikanan		Ton	10,300,000,000	

	IKANAN		lPerikanan											
			Eskpor Produk Kelautan dan Perikanan		Ton				Eskpor Produk Kelautan dan Perikanan		Ton			

			Perikanan										
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha		Jumlah Unit Usaha Pengolaha		Tanda	150,000,000	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan		Tanda	550,000,000	

	Skala Mikro Dan Kecil		ndan Pemasaran Memiliki Tanda Da										

			ftarUsahaPengolahan										
	Penyediaan Data dan Informa	Kec.	Jumlah Data dan I	1	Doku	150,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha	Kec.	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan	1	Dokume	250,000,000	

	si Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota		nformasi Usaha Pemasaran dan Pen				Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota		Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko.				

			golahan Hasil Perikanan berdasa										

			rkan Skala Usaha dan Risiko.										
							Pelaksanaan verifik	Kec.S	Jumlah reko	5	Rekome	300,000,000	Penambahan sub kegiatan sebagai percontoha

							asi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan		mendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha				n unit pengolah yang berstadar Nasional

							tingkat risiko		dan tingkat risiko				

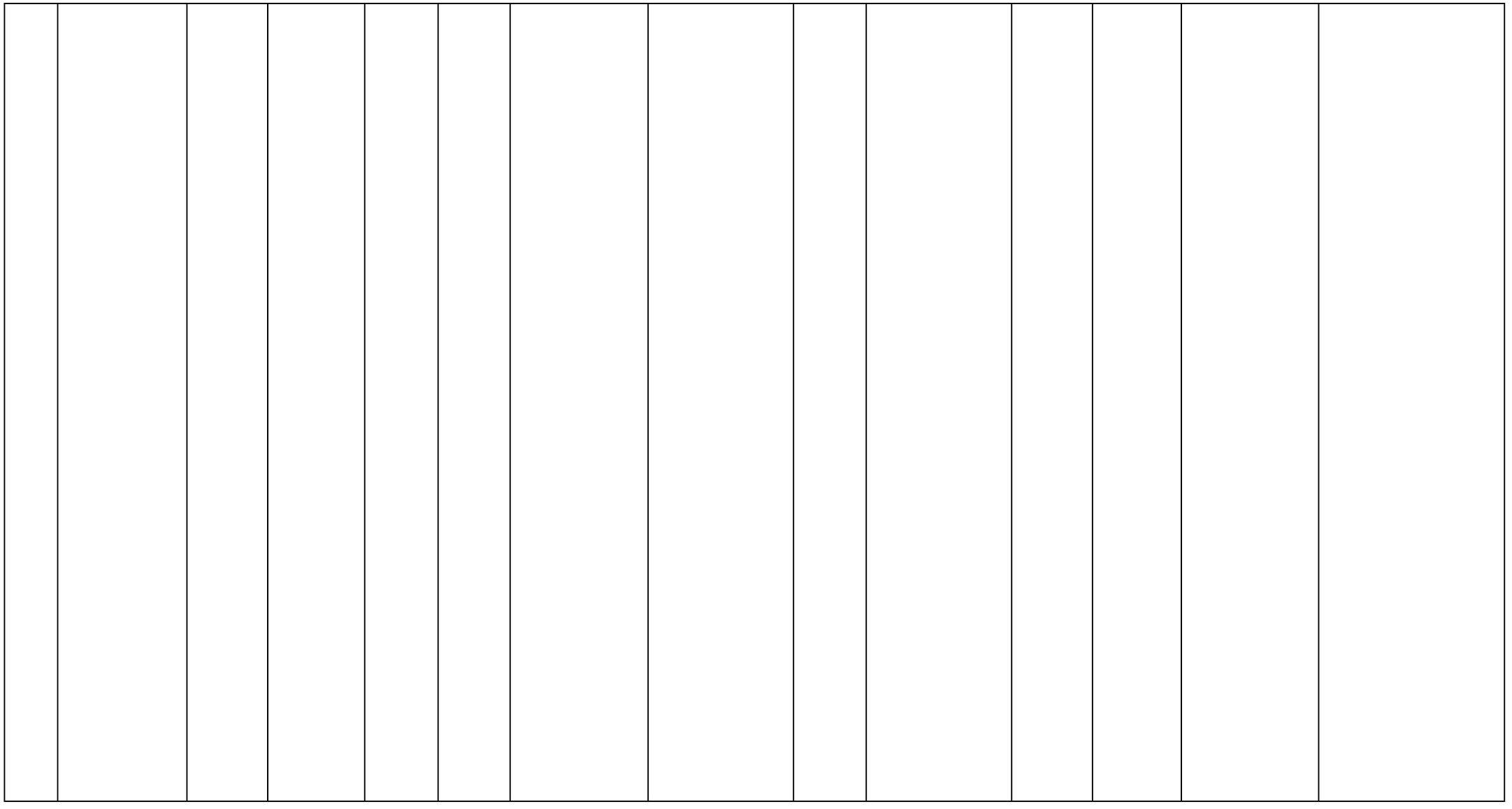

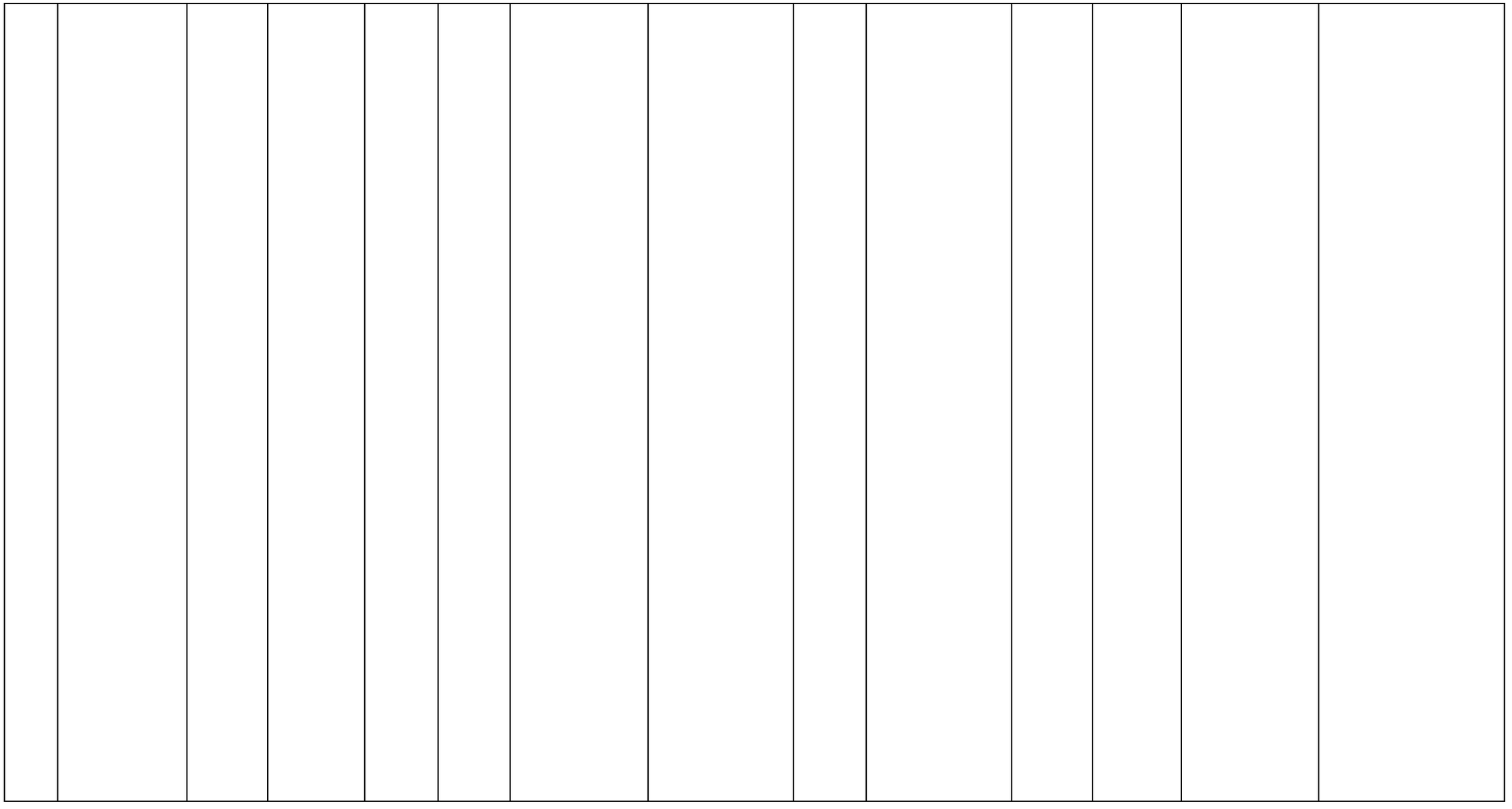

	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasa		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan		Unit	250,000,000					Unit	500,000,000	

	aran Skala Mikro dan Kecil		n Pemasaran Yang Menerapkan Stan										

			dar Mutu										
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pad	Kec.Sa	Jumlah Unit Usaha Pengolahand	15	Unit	250,000,000							Sub Keg menghalami Pemutakhiran berganti nama

	a Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		an Pemasaran Hasil Perikanan yan										

			gMendapatkanPembinaanTerhadap										

			pPenerapanPersyaratanPerizin										

			anBerusahapadaUsahaPengolahan										

			ndanPemasaranHasilPerikanan S										

			esuaiSkallaUsahadanRisiko.										

							Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala	Kec.S	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha	15	Unit	500,000,000	Sub Keg Hasil Pemutakhiran dari Sub Keg Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

							Usaha dan Risiko		Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				

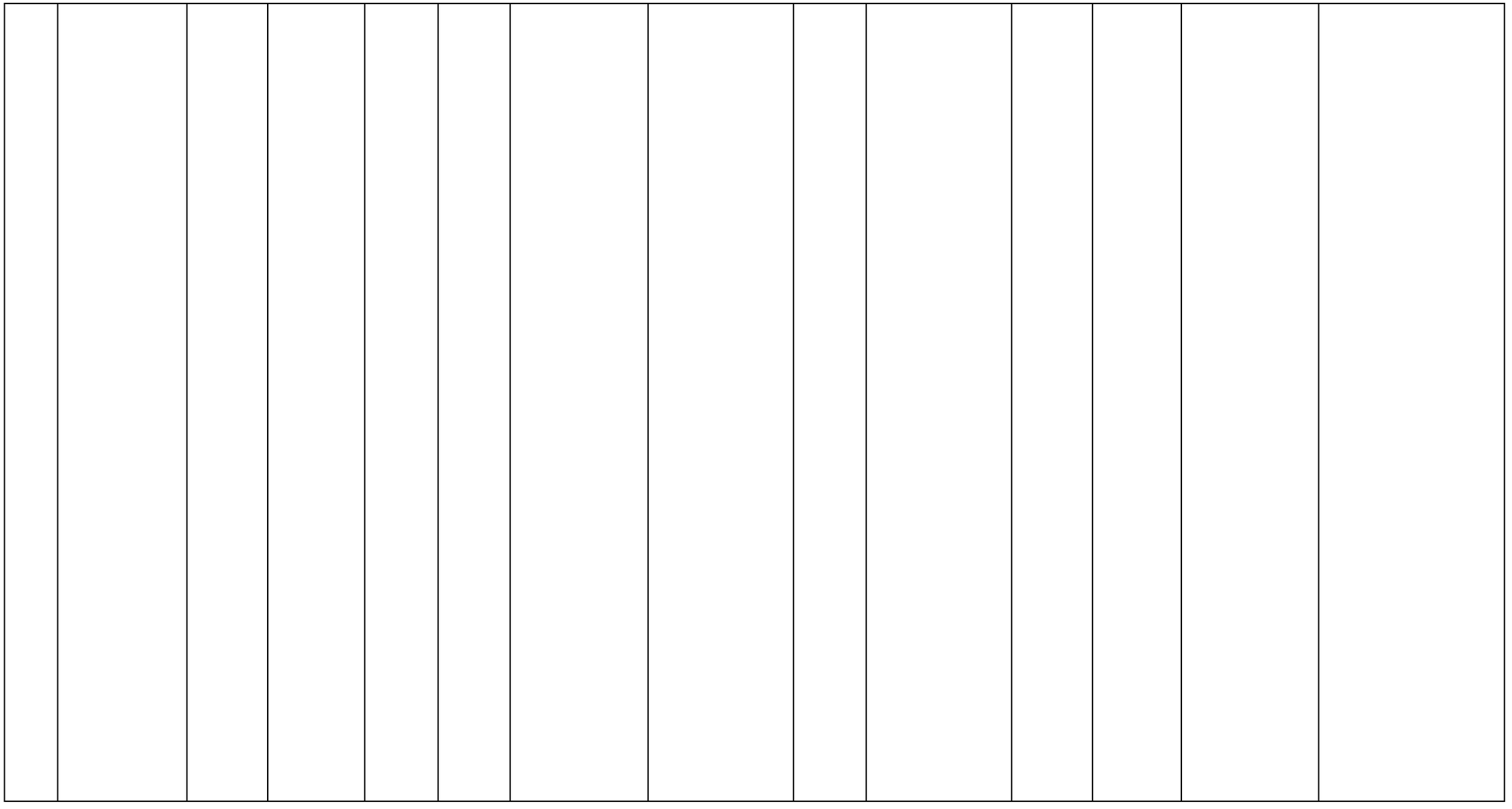

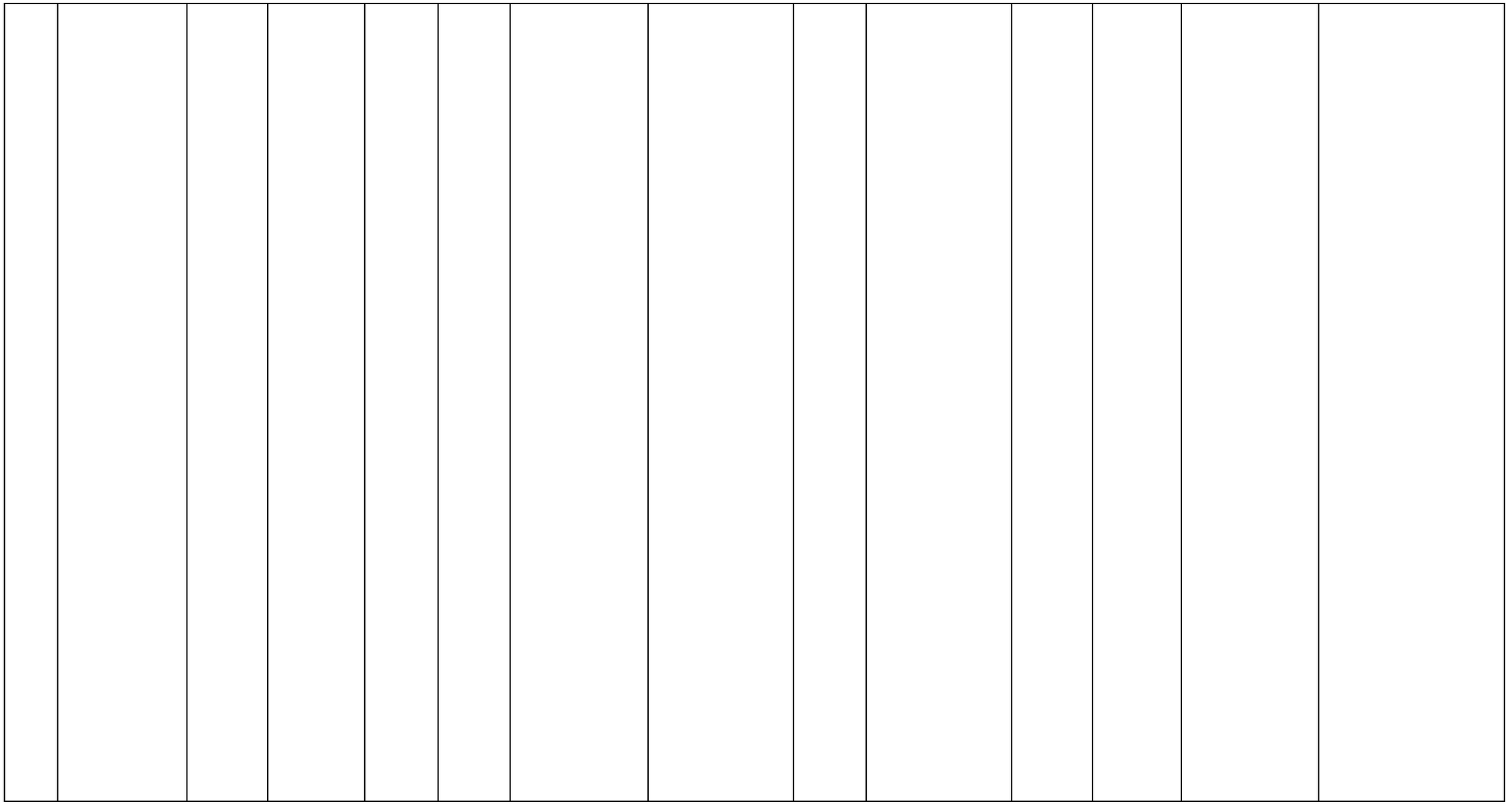

	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan		Jumlah PCKLAHSARDifasilitasi		POKL	1,500,000,000	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabu		Jumlah POKLAHSAR Difasilitasi Sarana Pengolahan dan Pemasaran.		POKLAH	9,250,000,000	

	Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota		tasi Sarana Penggolahan dan Pemas				paten / Kota						

			aran.										
	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dal	Kec.	Jumlah Peningkatan Ketersedia	50	Ton.	500,000,000	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabu	Kec.	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	50	Ton.	4,000,000,000	Pendukung Kegiatan Penanganan Stunting.

	am 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota		n Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pe				paten /Kota		/Kota .				

			ngolahanDalam1(Satu)DaerahKa										

			bupaten/Kota.										
	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikan	Kec.	Jumlah Pelaku Usaha Per	20	Pelak	1,00 0,00 0,00 0	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan	Kec.	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabu	50	Pelaku	5,25 0,00 0,00 0	

	an Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota		ikan an Skala Mikro dan Kecil dalam				Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota		paten /Kota yang Terfasilitasi.				

			m1(Satu)DaerahKabupaten/Kota										

			yangTerfasilitasi.										
						81,774,308,130						166,680,443,487	

Berdasarkan hasil analisis terhadap rancangan RKPD Dinas Kelautan dan Perikanan, terdapat Koreksi pada beberapa kegiatan sehingga mengalami perubahan dan berdampak pada penambahan maupun pengurangan anggaran, sebagai akibat dari penyesuaian terhadap beberapa kebijakan, maupun urgensi dari kegiatan itu sendiri.

Terdapat juga 5 sub kegiatan yang mengalami pemutakhiran pada SIPD RI walaupun pada Kepmen 900 masih ada disebutkan, sehingga perlu penyesuaian Kembali terhadap sub kegiatan yang mengalami pemuatkhiran. Sub Kegiatan yang mengalami pemutakhiran merupakan sub kegiatan yang penting jadi penyesuaian Kembali sangat diperlukan dan ini berdampak kepada evaluasi renstra.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara memberi ruang untuk mengakomodir Usulan dari para pemangku kepentingan, seperti masyarakat secara langsung maupun melalui badan legislatif (angota DPRD), LSM, Akademisi, maupun lintas OPD melalui mekanisme Musrenbang, baik pada tingkat Kecamatan selanjutnya didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten maupun Musrenbang Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan usulan dari hasil musrenbang OPD kabupaten di tingkat Kecamatan. Usulan para pemangku kepentingan ini, masih sejalan dengan isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan seperti yang tercermin pada Program dan Kegiatan dalam Dokumen Renstra Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara 2021-2026.

Kesesuaian usulan pemangku kepentingan dengan program kerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan tidak terlepas dari adanya proses pelaksanaan kegiatan Musrenbang baik tingkat Kecamatan maupun pada Kabupaten yang berjalan sangat baik. Beberapa masukan dan usulan dari para pemangku kepentingan terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara, disampikan dalam table TC.32 di bawah.

Tabel TC.32. Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun Rencana 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara.

Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara.

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.					
	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap					
1	KUB Cahaya Laut	Muara Badak Ilir	Kapal	12	Unit	Musrenbang
			Mesin	12	Unit	
2		Long Beleh Haloq, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu	12	Unit	Musrenbang
			Alat Tangkap	200	Unit	
3		Jl. Jembatan Ulin Poros Pela RT 002, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Kapal	10	Unit	Musrenbang
4	KUB BERKAH Desa Muara Kaman Ilir	Desa Muara Kaman Ilir, Kab. Kutai Kartanegara	Alat Tangkap	200	Unit	Musrenbang
5		Desa Sedulang , Kab. Kutai Kartanegara	Perahu	10	Unit	Musrenbang
			Mesin Ces	10	Unit	

6		KUB Se kelurahan Dondang Jalan Ahmad Sifa Rt.13 kelurahan Dondang Lat 0°78607° Long 117.23124° P. 4 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Perahu	30	Unit	Musrenbang
			Mesin Ces	30	Unit	
7		Desa Teratak, Kab. Kutai Kartanegara	Rengge	200	Piss	Musrenbang
8		Kelompok Tambak Sinar Baru, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu	12	Unit	Musrenbang
			Mesin Ces	12	Unit	
9		Tanjung Harapan RT.01 , Kab. Kutai Kartanegara	Kapal	10	Unit	Musrenbang
			Mesin	10	Unit	
10	KUB Pantai Harapan	Tanjung Harapan RT 05 , Kab. Kutai Kartanegara	Perahu	12	Unit	Musrenbang
			Mesin Ces	12	Unit	
11		Desa Liang Buaya, Kab. Kutai Kartanegara	Kawat Pengilar	600	Roll	Musrenbang
12	Kelompok Usaha Bersama "Karya Bersatu"	Dusun Delta Mahakam, RT. 016, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	30		Musrenbang
13	Kel Nelayan Berkah Bersama	Jalan Abdullah RT 014 Desa sebulu Ilir Kecamatan Sebulu , Kab. Kutai Kartanegara	Rengge	200	Piss	Musrenbang

14		Desa Santan Tengah 0.01175249°S 117,46656367°E , Kab. Kutai Kartanegara	Rengge	200	Piss	Musrenbang
15		Desa Santan Tengah Nelayan Cahaya Santan RT.04, Kab. Kutai Kartanegara	Kapal	10	Unit	Musrenbang
16		Perkumpulan Nelayan Berkah Marangkayu RT.04 Desa Santan Tengah, Kab. Kutai Kartanegara	Kapal	10	Unit	Musrenbang
17		KUB Karya Santan Bersatu RT.12 Desa Santan Tengah, Kab. Kutai Kartanegara	Kapal	10	Unit	Musrenbang
18		JL.RIMBA AYU RT.007 DESA KEDANG MURUNG, Kab. Kutai Kartanegara	Kawat Pengilar	600	Roll	Musrenbang
19	KUB Nalayan Cipta Mandiri	Jalan Swadaya RT.02 (Koordinat ; 521324, 9911086, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu	20	Unit	Musrenbang
20	NELAYAN BELIDA JAYA	JL. K.H AGUS SALIM RT.04, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	12		Musrenbang
21	Kelompok Nelayan "Jarai Mahkota"	Muara Kaman Ulu Jl. Jend. Sudirman RT. 003,	Perahu	12	Unit	Musrenbang
			Mesin Ces	12	Unit	

		Kab. Kutai Kartanegara				
22		Desa Long Beleh Haloq, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	12		Musrenbang
23		Jl. jembatan ulin poros Pela RT 002, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu	12	Unit	Musrenbang
			Mesin Ces	12	Unit	
24		Jalan. Jembatan Ulin Poros 1 Rt 006, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu	12	Unit	Musrenbang
			Mesin Ces	12	Unit	
25		Jl. jembatan ulin poros pela RT 005, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu	12	Unit	Musrenbang
			Mesin Ces	12	Unit	
26		Jl. jembatan ulin poros pela RT 001, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu	12	Unit	Musrenbang
			Mesin Ces	12	Unit	
27	KUB RAKAT	Desa Muara Kaman Ilir, Kab. Kutai Kartanegara	Kawat Pengilar	600	Roll	Musrenbang
28		Sebemban RT. 04, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	12	Unit	Musrenbang
29	Kelompok Preyan	Sebemban RT. 05, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	12	Unit	Musrenbang
30	kelompok Luah Preyan	Sebemban RT. 05, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu	12	Unit	Musrenbang
31	KUB Jembatan Satu	Sebemban RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	12	Unit	Musrenbang

32	Kl Luah Monen	Sebemban RT. 02, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	12	Unit	Musrenbang
33	KUB Maju Bersama	Sebemban, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	12	Unit	Musrenbang
34		RT 24 Desa Sebuntal, Kab. Kutai Kartanegara	Rengge	200	Piss	Musrenbang
35		Desa Teratak, Kab. Kutai Kartanegara	Kawat Pengilar	600	Roll	Musrenbang
36		Desa Teratak, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu	25	Unit	Musrenbang
37		Desa Teratak, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	25	Unit	Musrenbang
38	Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan "Kedang Rantau"	Muara Kaman Ulu Dusun Danau Lipan, RT. 004, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu	12	Unit	Musrenbang
			Mesin Ces	12	Unit	
39		Desa Kupang Baru, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu	20	Unit	Musrenbang
			Mesin Ces	20	Unit	
40	Kelompok Usaha Bersama " Makmur Sentosa" RT 04 Teluk pemedas	Jl. Bpp-Handil II RT 04 Teluk Pemedas, Kab. Kutai Kartanegara	Rengge	200	Piss	Musrenbang
41	Kelompok nelayan "Sigagu Berkah"	Jl. Bpp-handil II RT 06 Teluk pemedas, Kab. Kutai Kartanegara	Rengge	200	Piss	Musrenbang
42	KUB Padadaan Semoga Jaya	Teluk Dalam Jalan Karya RT.03 (521826.65, 9910590.88), Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	12	Unit	Musrenbang
43			Perahu	20	Unit	Musrenbang

		Desa Kelekat, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	20	Unit	
44	Kelompok nelayan 'Putra Mahakam'	Jl. Jend. A. Yani RT. 009, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu	20	Unit	Musrenbang
			Mesin Ces	20	Unit	
45	KUB jahe sejatera	kel Pemedas kec samboja				Pokok Pikiran DPRD
46	Kelompok Nelayan "Putra Setia Raja Jaya"	Desa Muara Enggelam				Pokok Pikiran DPRD
47		Kahala Ilir	Perahu dan Mesin Ces			Pokok Pikiran DPRD
48	kelompok Bekayuh	Muara Aloh	perahu fiber			Pokok Pikiran DPRD
49	kelompok Bebintis	Kahala Ilir	perahu fiber			Pokok Pikiran DPRD
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					
	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
1	Bantuan Kelompok Bandeng Berkah Frezer dan cool box	Muara Badak Ilir Jl. Kapitan Toko Lima, RT. 08, Kab. Kutai Kartanegara	Freezeer	5	Unit	Musrenbang
			Coolbox	5	Unit	
2	Pembudidaya di Desa Wisata	RT 03 Desa Kota Bangun III , Kab. Kutai Kartanegara	Pakan	7,000	Kg	Musrenbang
3		RT 11 Desa Kota Bangun III , Kab. Kutai Kartanegara	Kolam Terpal	10	Unit	Musrenbang
			Pakan	3,500	Kg	
			Bibit Lele	20,000	Kg	

4		Jln. Erlian RT 004 Desa Sanggulan , Kab. Kutai Kartanegara	Pakan	7,000	Kg	Musrenbang
5		Jl. Tambak Rel RT. 11 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kolam Terpal	12	Unit	Musrenbang
6		Jl. AM. Sangaji RT.04 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Keranba Jaring Apung	12	Unit	Musrenbang
7		Jl. AM. Sangaji RT.09 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Keranba Jaring Apung	12	Unit	Musrenbang
8		Jl. Aji Imbut RT.02 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Keranba Jaring Apung	12	Unit	Musrenbang
9		Jl. Abdul Riso RT. 005 , Kab. Kutai Kartanegara	Keranba Jaring Apung	12	Unit	Musrenbang
10		Jl. Abdul Riso RT. 005, Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Ikan	30,000	ekor	Musrenbang
11		Jl. Abdul Riso RT. 005, Kab. Kutai Kartanegara	Pakan Ikan	5,000	Kg	Musrenbang
12		Desa Sedulang, Kab. Kutai Kartanegara	KJA	10	Unit	Musrenbang
			Bibit IKan	20,000	ekor	
			Pakan	3,500	Kg	

13	POKDAKAN Sarining Toya	Dusun Mekar sari, RT 08, Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Ikan Lele	35,000	ekor	Musrenbang
			Pakan Ikan	5,000	Kg	
14		Rantau hempang, Kab. Kutai Kartanegara	KJA	10	Unit	Musrenbang
			Bibit IKan	20,000	ekor	
			Pakan	3,500	Kg	
15		Bukit samboja indah RT 07 pembibitan ikan Jaka Tingkir kel.Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara	Pakan Ikan	5,000	Kg	Musrenbang
16		Poktan Surya Bakti RT 06 kel.Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara	Kolam Bak UPR	5	Unit	Musrenbang
17		Dusun Sidomulyo , Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Ikan	30,000	ekor	Musrenbang
18		Kelurahan Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Ikan	30,000	ekor	Musrenbang
19		Desa Tanjung Batu, Kab. Kutai Kartanegara	KJA	10	Unit	Musrenbang
			Bibit IKan	20,000	ekor	
			Pakan	3,500	Kg	
20		Desa Teluk Bingkai Kecamatan Kenohan, Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Ikan	30,000	ekor	Musrenbang
21		Desa Teluk Bingkai, Kab. Kutai Kartanegara	Pakan Ikan	5,000	Kg	Musrenbang
22	Kelompok Budi Daya Rumput Laut PASIRAN JAYA BERKAH RT.4	Tanjung Harapan RT 04, Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Rumput Laut	5,000	Kg	Musrenbang

23		Santan Tengah Dusun kampung masjid, Kab. Kutai Kartanegara	Rehab kolam UPR	1	Paket	Musrenbang
24		Jl. Jembatan Ulin Poros Pela RT 002, Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Ikan	30,000	ekor	Musrenbang
25		DESA TELUK DALAM, Kab. Kutai Kartanegara	Pakan Ikan	5,000	Kg	Musrenbang
26		Desa Puan Cepak RT.001, RT.002, RT.003, RT.004, RT.005, Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Ikan	150,000	Kg	Musrenbang
27		Desa Sanggulan Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Kolam Terpal	10	Unit	Musrenbang
28		Jl. AM. Sangaji RT.07 Kelurahan Baru Kec Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	KJA	10	Unit	Musrenbang
			Bibit IKan	20,000	ekor	
			Pakan	3,500	Kg	
29		Gapoktan mekar Jaya Rt 04 Kel.wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara	Pupuk Urea	50	Kg	Musrenbang
30		Dusun Selendong RT. 006, Kab. Kutai Kartanegara	Pakan Ikan	5,000	Kg	Musrenbang
31		Dusun Selendong RT. 006, Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Ikan	25,000	Kg	Musrenbang

32		Desa Teratak, Kab. Kutai Kartanegara	Kolam Terpal	10	Unit	Musrenbang
			Bibit IKan	20,000	ekor	
			Pakan	3,500	Kg	
33		Dusun Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Kolam Terpal	10	Unit	Musrenbang
			Bibit IKan	20,000	ekor	
			Pakan	3,500	Kg	
34		Rt. 03 Desa Loa Raya, Kab. Kutai Kartanegara	KJA	10	Unit	Musrenbang
			Bibit IKan	20,000	ekor	
			Pakan	3,500	Kg	
35		Rantau Hempang RT 03, Kab. Kutai Kartanegara	Kolam Terpal	10	Unit	Musrenbang
			Bibit IKan	20,000	ekor	
			Pakan	3,500	Kg	
36		Kelompok Mina Karya Santan RT.13 Desa Santan Tengah, Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Ikan	30,000	ekor	Musrenbang
37		jalan A.Yani RT 006 desa Sebulu Ilir Kecamatan Sebulu , Kab. Kutai Kartanegara	Pakan Ikan	5,000	Kg	Musrenbang
38		jalan A.yani RT 006 Desa Sebulu Ilir Kecamatan Sebulu , Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Ikan	30,000	Kg	Musrenbang

39		Kelurahan Muara Jawa Ilir (Koord.1. 525109 LAT 9903596 LONG Koord.2. 525199 LAT 9903607 LONG), Kab. Kutai Kartanegara	Pintu Air Tambak	1	Paket	Musrenbang
40		rt 09 Desa Makarti Kecamatan Marangkayu, Kab. Kutai Kartanegara	Pakan Ikan	5,000	Kg	Musrenbang
41		RT 09 Dusun Mekarsari Desa Makarti, Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Ikan	30,000	Kg	Musrenbang
42		Kembang Janggut	Pakan Ikan			Pokok Pikiran DPRD
43	Kelompok Petani Keramba "Bena Mahakam"	Mangkurawang	KJA			Pokok Pikiran DPRD
44	Kelompok Petani Keramba "Bena Mahakam"	Mangkurawang	Pakan Ikan			Pokok Pikiran DPRD
45	Kelompok Petani Keramba "Usaha Tani"	Mangkurawang	KJA			Pokok Pikiran DPRD
46	Kelompok Petani Keramba "Usaha Tani"	RT.18, Kel. Mangkurawang, Kab. Kutai Kartanegara	Pakan Ikan			Pokok Pikiran DPRD
47	Kelompok Petani Keramba "Usaha Tani"	RT.18, Kel. Mangkurawang, Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Ikan			Pokok Pikiran DPRD
48	Kelompok Keramba Perumahan RT.19	Mangkurawang	KJA			Pokok Pikiran DPRD
49	Kelompok Keramba Perumahan RT.19	Mangkurawang	Pakan Ikan			Pokok Pikiran DPRD

50	Kelompok Keramba Perumahan RT.19	Mangkurawang	Bibit Ikan			Pokok Pikiran DPRD
51	Kelompok Petani Keramba "Manula Kreatif"	RT.9 Kel. Mangkurawang, Kab. Kutai Kartanegara	KJA			Pokok Pikiran DPRD
52	Kelompok Petani Keramba "Manula Kreatif"	RT.9 Kel. Mangkurawang, Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Ikan			Pokok Pikiran DPRD
	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan					
1		Desa Umaq Tukung, Kab. Kutai Kartanegara	Pelatihan Budidaya Ikan dan Bantuan Sapras	100	Orang	Musrenbang
2		Desa Ritan Baru, Kab. Kutai Kartanegara	Pelatihan Budidaya Ikan dan Bantuan Sapras	100	Orang	Musrenbang
3		Desa Sidomulyo Kec. Tabang, Kab. Kutai Kartanegara	Pelatihan Budidaya Ikan dan Bantuan Sapras	100	Orang	Musrenbang
4		Desa Muara Pedohon, Kab. Kutai Kartanegara	Pelatihan Budidaya Ikan dan Bantuan Sapras	100	Orang	Musrenbang

	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota					
1	Alat Tangkap Ramah Lingkungan	Sebemban RT. 05, Kab. Kutai Kartanegara	Kawat Pengilar	500	Roll	Muarenbang
2	Alat Tangkap Ramah Lingkungan	Sabintulung Dusun Kolam RT. 003, Kab. Kutai Kartanegara	Kawat Pengilar	500	Roll	Muarenbang
			Rengge	500	Piss	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
	Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					
	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
1		Sebemban, Kab. Kutai Kartanegara	Mixer	5	Unit	Musrenbang
			Sealer	5	Unit	
			Blender	5	Unit	

			Pemngering	5	Unit	
2		Sebemban RT. 05, Kab. Kutai Kartanegara	Freezer	5	Unit	Musrenbang
3		Kayu Batu Jl. Dr. Nazir RT.03, Kab. Kutai Kartanegara	Freezer	5	Unit	Musrenbang
4		Kayu Batu Jl. Dr. Nazir RT.03, Kab. Kutai Kartanegara	Mixer	5	Unit	Musrenbang
			Sealer	5	Unit	
			Blender	5	Unit	
			Pemngering	5	Unit	
5	Poklahsar 'Semoga Berkah'	Muaara Muntai Ulu Jl. Jend. A. Yani RT. 011, Kab. Kutai Kartanegara	Mixer	5	Unit	Musrenbang
			Sealer	5	Unit	
			Blender	5	Unit	
			Pemngering	5	Unit	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Agenda Pembangunan Nasional merupakan bagian penting untuk diintegrasikan dalam penyusunan Renja Kelautan dan Perikanan. Agenda Pembangunan Nasional tercermin dari Visi Presiden Yaitu : Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong.

Upaya untuk mewujudkan visi ini melalui 9 Misi Pembangunan, dengan 4 Misi menjadi bagian dari pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang selaras dengan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
   Misi KKP : Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.
   Misi KKP : Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap Perekonomian Nasional.
3. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Bekelanjutan.
   Misi KKP : Penigkatan Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
4. Pengelolaan Pemerintah Yang Bersif, Efektif dan Terpercaya.
   Misi KKP : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Visi Misi Presiden yang kemudian diselaraskan dengan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut disederhanakan dalam arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu :

1. Memperbaiki Komunikasi Dengan Nelayan, Penyederhanaan Perizinan, Pengembangan Pelabuhan Perikanan, Pengaturan Penangkapan Ikan sampai ZEE dan Laut Lepas, Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
2. Mengoptimalkan dan memperkuat sektor Budidaya Dalam Rangka penyediaan lapangan kerja, Sekaligus meningkatkan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu

produk dan nilai tambah serta peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan.

4. Memperbaiki pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau pulau kecil, penguatan sumber daya perikanan.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan

Dalam tatanan implementasi, Kebijakan Nasional tersebut tertuang dalam Program Prioritas Nasional (P6) yaitu Program Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng. Program ini menyasar pertumbuhan ekspor komoditas udang dalam rangka mempertahankan dominasi Indonesia sebagai Negara Pengekspor Komoditi udang utama dunia. Program Prioritas ini diterjemahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku Eksekutor Program Nasional tersebut ke dalam Program Srhimp Estate.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mencermati tantangan dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan, serta mengacu pada target kinerja pembangunan kelautan dan perikanan di Kutai Kartanegara yang tertuang dalam RENSTRA Perubahan Kelautan dan Perikanan 2017-2021, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

Tabel . Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara Tahun 2025.

N	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja sasaran
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sektor perikanan	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	13,5 %
			Indeks Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya Ikan dan	104
			Nilai Produksi Perikanan	10.658 Miliyar Rupiah

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara Tahun Rencana 2025, Rencana Program dan Kegiatan Tahun Rencana 2025 disusun dengan memperhatikan :

a. Pencapaian Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara 2021-2026; khusunya pada Program Kesejahteraan sosial yaitu Fasilitasi Pengembangan Usaha bagi masyarakat miskin minimal 1.000 Penduduk PerTahun, Program Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan dengan target Fasilitasi sarana dan prasarana 25.000 Nelayan & Pembudidaya Perikanan Produktif dalam upaya peningkatan produksi dan akses pemasaran dan Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim Sektor Perikanan (*Nyaman Be'Jukut*).
b. Pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah termuat dalam Renstra Kelautan dan Perikanan 2021-2026.
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020
d. UU Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
e. Berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan nasional, Khususnya pada Program Prioritas Nasional (P6) yaitu Program Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng, diterjemahkan ke dalam Program Srhimp Estate oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
c. 3 PILAR PEMBANGUNAN KP :
   - Kedaulatan
   - Keberlanjutan
   - Kesejahteraan,

g. Proses Analisis Hasil Evaluasi
h. Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)

Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Rencana 2025 direncanakan berjumlah 5 Program, 21 Kegiatan dan 68 Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran yang direncanakan sebesar Rp166.680.443.487,-.

Dengan telah diselesaikannya program direktif khususnya program fasilitasi 25,000 nelayan dan pembudidaya ikan aktif hingga Tahun 2024 yang sudah mencapai 31,500 orang maka pada Tahun anggaran pemberian fasilitas kepada nelayan dan pembudidaya disasdarkan kepada kelomopok – kelompok yang belum pernah tersentuh bantuan dan mebndukuing pencapaian target produksi dan pwersiapan menuju IKN untuk Kukar sebagai lumbung pangan.

Program Nyaman_Be'Jukut yang merupakan program pengentasan kemiskinan nelayan dan pembudidaya akan tetap menajdi rencana kerja di Tahun 2025 dengan masih tingginya permintaan desa akan kegiatan ini, akan tetapi bahwa terkait dengan kegiatan kemiskinan Dislutkan akan tetap menyesuaikan dengan program RBPK yang dikelola oleh BAPPEDA mengingat Dislutkan bukan OPD Tekhnis yang memiliki alat ukur/ indikator kesejahteraan. Terkait dengan besara target akan menysuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada di Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Rencana 2025, secara rinci dsampaikan dalam tabel berikut:

Tabel TC.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten kutai Kartanegara.

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	NON URUSAN (GENERIK)										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip Perangkat Daerah			Angka	19,421,843,487				Angka	19,253,308,130
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja.			Dokum	1,050,000,000				Dokumen	926,766,085
	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.		Dikum	50,000,000	APBD II.	Koordinasi walidata pendukung statistik sektoral daerah		Dikumen	50,000,000

				PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.		Data	250,000,000	APBD II.	Pelaksanaan pengumpulan data sektoral daerah, Satu Data (BECIK) - Kecamatan sebagai pusat data (operasional,Honorarium, Peralatan, pendampingan teknis)		Data	250,000,000
				PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.		Berita	50,000,000	APBD II.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)		Berita Acara	50,000,000
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.		Dokum	500,000,000	APBD II.	Penambahan Anggaran Untuk Penyusunan Renstra		Dokumen	300,000,000

				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	-	Dokumen	-	APBD II.	Penyusunan Dokumen RKA dapat dilaksanakan tanpa Pembiayaan.		Dokumen	35,000,000
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	-	Dokumen	-	APBD II.	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA dapat dilaksanakan tanpa Pembiayaan.		Dokumen	35,000,000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.		Laporan	50,000,000	APBD II.			Laporan	35,000,000
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	DKP Kutai Kartanegara,	2	Dokumen	150,000,000	APBD II.	Untuk Pelaksanaan Evaluasi Renstra dan Evaluasi Renja		Laporan	171,766,085

						Tenggarong.									
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah.		21	Dokumen	14,265,195,363			22	Dokumen	15,354,893,921
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	120	Orang/ Bulan	13,990,195,363	APBD II.		120	Orang/Bulan	15,059,893,921
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	3	Laporan	25,000,000	APBD II.	Laporan Keuangan Akhir Tahun : Laporan catatan atas laporan keuangan (CALK); Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Operasional (LO)		Laporan	20,000,000
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	-	Dokumen	-	APBD II.	Dapat disediakan tanpa Pembiayaan, anggaran difokuskan pada sub kegiatan penting lainnya.		Dokumen	25,000,000

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	18	Laporan	225,000,000	APBD II.			Laporan	225,000,000
				Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1	Dokumen	25,000,000	APBD II.		1	Dokumen	25,000,000
				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2	Dokumen	80,000,000			6	Dokumen.	65,000,000
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1	Dokumen	25,000,000	APBD II.	Penambahan anggaran untuk peningkatan kualitas laporan.	1	Dokumen	10,000,000
				Pembinaan, Pengawasan, dan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan	DKP Kutai Kartanegara,	1	Laporan	25,000,000			1	Laporan	25,000,000

				Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.	Tenggarong.									
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1	Laporan	30,000,000	APBD II.		1	Laporan	10,000,000
				Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	-	Laporan	-	APBD II.	Dapat dilaksanakan tanpa Pembiayaan , anggaran dapat difokuskan pada sub kegiatan lain.	3	Laporan	20,000,000
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.		1	Dokumen	10,000,000	APBD II.		1	Dokumen	10,000,000
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1	Dokumen	10,000,000	APBD II.		1	Dokumen	10,000,000
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian.		1	Dokumen	125,000,000		Anggaran 25.000.000 tidak memadai.	2	Dokumen	125,000,000

				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1	Dokumen	25,000,000	APBD II.		1	Dokumen	25,000,000
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaaan Sistem Informasi Kepegawaian.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.		Dokum	25,000,000	APBD II.			Dokumen	25,000,000
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.		Dokum	25,000,000	APBD II.			Dokumen	25,000,000
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.		Orang	50,000,000	APBD II.			Orang	50,000,000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Jumlah ASN Kelautan dan Perikanan Yang Mendapatkan Layanan			ASN	845,750,000	APBD II.			ASN	745,750,000
				Penyediaan Komponen	Jumlah Paket Komponen	DKP Kutai Kartaneg	1	Paket	3,750,000	APBD II.		1	Paket	3,750,000

				Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.	ara, Tenggarong.									
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1	Paket	100,000,000	APBD II.		1	Paket	100,000,000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1	Paket	50,000,000	APBD II.		1	Paket	50,000,000
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1	Paket	50,000,000	APBD II.		1	Paket	50,000,000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1	Dokum	42,000,000			1	Dokumen	42,000,000
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1	Lapoan	100,000,000		Penambahan Sub Kegiatan untuk fasilitasi Tamu.	1	Laporan	-

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Di Dalam Daerah dan Di Luar Daerah		Lapora	450,000,000	APBD II.			Laporan	450,000,000
				Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.		Dokum	50,000,000				Dokumen	50,000,000
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah Diadakan			Unit	1,020,000,000	APBD II.			Unit	-
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.		Unit	570,000,000	APBD II.	Penggantian Kendaraan Dinas Jabatan Fungsional (Roda Dua) yang sudah memasuki usia 10th pemakaian		Unit	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.		Unit	450,000,000	APBD II.	Penahmbahan anggaran untuk pembelian Generator Set 20KVA untuk Dinas Kabupaten untuk mengganti Genset Dinas yang sudah		Unit	-

											sering rusak dengan usia pemakaian diatas 10th, Pembelian Genset Portable untuk kegiatan diluar kantor				
				Pengadaan Gedung Kantor	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangun Lainnya Disediakan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.									
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.		3	Lapora	1,485,898,124	APBD II.		5	Laporan	1,485,898,124
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1	Lapora	250,000,000			1	Laporan	250,000,000
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1	Lapora	25,000,000	APBD II.		1	Laporan	25,000,000

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1	Lapora	1,210,898,124			1	Laporan	1,210,898,124
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjnag Urusan Pemerintahan.			Persen	540,000,000	APBD II.			Persen	540,000,000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.		Unit	115,000,000	APBD II.			Unit	115,000,000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.		Unit	95,000,000	APBD II.			Unit	95,000,000

				Operasional atau Lapangan.										
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.		Unit	50,000,000	APBD II.			Unit	50,000,000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.		Unit	230,000,000				Unit	230,000,000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.		Unit	50,000,000	APBD II			Unit	50,000,000
				URUSAN										
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap			Ton	60,898,600,000				Ton	27,695,000,000

				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nelayan Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan.			Nelaya	26,398,600,000				Nelayan	18,677,000,000
				Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia.	Kabupaten Kukar.		Dokum	220,000,000	APBD II			Dokumen	320,000,000
				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia.	Kecamatan Samboja dan Kecamatan Anggana.	4	Unit	6,000,000,000	APBD II		3	Unit	3,500,000,000

				Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Kec.Samboja, Muara Jawa, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Badak, Marangkayu.Muara Kaman, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai, Kenohan, Kembang Janggut.					Sub Kegiatan Mengalami Pemutakhiran berganti nama			
				Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Kec.Samboja, Muara Jawa, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Badak, Marangk		Unit	20,178,600,000	APBD II	(1) Sub Kegiatan Baru Hasil Pemutakhirabn dari Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (2) Rencana Strategis OPD :		Unit	14,857,000,000

						ayu.Muara Kaman, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai, Kenohan, Kembang Janggut.					Peningkatan Produksi dan Produktivitas serta Nilai Tambah Sektor Perikanan (3) Pilot Project kapal berbahan fiberglass (4) Pembangunan Pertanian Bernasis Kawasan			
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KUB Naik Kelas			KUB	32,800,000,000	-			KUB	8,668,000,000
					Jumlah Nelayan Miskin dan Rentan Miskin Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan			Orang		APBD II			Orang	
				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Kec. Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara		Orang	31,500,000,000	APBD II	(1) Pemenuhan Target Pengentasan Kemiskinan Pelaku usaha Perikanan Tangkap (Nelayan). (2) Pelatihan Nelayan		Orang	8,310,000,000

						Badak, Marangkayu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai.									
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya.	Kec. Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai.	50	Kelomp	300,000,000	APBD II		86	Kelompok	258,000,000

				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kec. Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai.		Unit	1,000,000,000	APBD II	Diperlukan dalam rangka fasilitasi pertemuan /rembuk Nelayan. (Pertemuan Penyuluh Swadaya, Pembudidaya Ikan, Pengusaha dan Lembaga Pembiayaan, KTNA)		Unit Usaha	100,000,000
				Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI Beroperasi		2	Unit	500,000,000	-		4	Unit	50,000,000
				Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Desa Kota Bangun Ilir, Kec. Kota Bangun, Desa Muara	-	Dokum	-	APBD II	Kegiatan dapat dilaksanakan tanpa anggaran		Dok	-

				Pelelangan Ikan (TPI)		Badak Ilir, Kec. Muara Badak, Desa Kutai Lama, Kec. Anggana, Keluraha n Kuala Samboja, Kec. Samboja.									
				Pelayanan Penyelenggaraa n Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Desa Kota Bangun Ilir, Kec. Kota Bangun, Desa Muara Badak Ilir, Kec. Muara Badak, Desa Kutai Lama, Kec. Anggana, Keluraha n Kuala		Layana	500,000,000	APBD II	Untuk peningkatan Kualitas Layanan dalam mendukung optimalisasi operasional TPI.		Layanan	50,000,000

						Samboja, Kec. Samboja.									
				Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan diterbitkan			Tanda	1,050,000,000				Tanda Daftar Kapal Perikanan	250,000,000
				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan	Kutai Kartanegara.		Dokum	50,000,000	APBD II	Penyediaan Dokumen SOP Penerbitan Tanda		Dok	-

				Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota.						Daftar Kapal Perikanan.			
				Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Kec. Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu.		Rekom	1,000,000,000	APBD II	Dalam Rangka pemenuhan persyaratan untuk Ketersediaan SPBN		Rekomendasi	250,000,000
				Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu)	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai 10 GT Terdaftar			Kapal	150,000,000	APBD II			Kapal	50,000,000

				Daerah Kabupaten/Kota										
				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota.	Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai.		Dokum	50,000,000	APBD II			Dok	-
				Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT							Sub Kegiatan Mengalami Pemutakhiran berganti nama			
				Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai.		Rekom	100,000,000		Sub Kegiatan Baru Hasil Pemutakhirabn dari Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan		Rekomendasi	50,000,000

										Ukuran Sampai Dengan 10 GT				
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya			Ton	64,060,000,000	APBD II			Ton	29,726,000,000
				Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah POKDAKAN Bermitra			pokdak	4,705,000,000	-			pokdakan	2,151,000,000
					Jumlah POKDAKAN Naik Kelas			pokdak		APBD II			pokdakan	
				Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas.	Wilayah Kutai Kartanegara		Kelomp	455,000,000	APBD II			Kelompok	455,000,000

				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan.	Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai, Kembang	50	Kelomp	250,000,000			48	Kelompok	146,000,000

						Janggut, Tabang.								
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Sebulu, Muara		Kelomp	1,000,000,000	APBD II	Untuk memfasilitasi Rembuk Pembudidaya Ikan (Pertemuan Penyuluh Swadaya, Pembudidaya Ikan, Pengusaha dan Lembaga Pembiayaan, KTNA)		Kelompok	200,000,000

						Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai, Kembang Janggut, Tabang.								
				Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Loa Janan, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Sebulu, Muara			3,000,000,000	APBD II	Rencana Priritas OPD : Peningkatan Produksi dan Produktivitas serta Nilai Tambah Sektor Perikanan (Pelatihan dan Pendampingan SDM dan Kelembagaan)		Kelompok	1,350,000,000

						Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Muntai, Kembang Janggut, Tabang.									
				Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Diterbitkan			TDPI	200,000,000	APBD II			TDPI	200,000,000
				Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan.	Kecamatan Tenggarong.			-	APBD II			Rekomendasi	-

				Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai, Kembang		Rekom	200,000,000	APBD II			Rekomendasi	200,000,000

						Janggut, Tabang.								
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan Terfasilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan.			Pembu	59,155,000,000	APBD II			Pembudidaya	27,375,000,000
				Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Di Wilayah Kutai Kartanegara dan Luar Daerah.	1	Dokum	150,000,000	APBD II	Peningkatan Kualitas Data Statistik Budidaya.	1	Dok.	100,000,000
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kecamat		Unit	33,500,000,000	APBD II	Pembangunan / Rehab UPR/HSRT. (Pemenuhan Target Renstra)		Unit	5,500,000,000

						an Loa Kulu, Loa Janan, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak.								
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Tenggaro		Unit	25,305,000,000	APBD II	Peningkatan Produksi dalam rangka menyambut IKN dan Pengembangan Budidaya Kerang Dara dan Vanamae		Unit	21,575,000,000

						ng, Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai, Kembang Janggut, Tabang.									
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Kec. Anggana, Loa Kulu, Kota Bangun, Muara Muntai, Tenggarong.		Dokum	200,000,000	APBD II			Dokumen	200,000,000
				Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat.	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat.	Wilayah Kutai Kartanegara		Orang	-	APBD II			Orang	-

				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi.	Wilayah Pesisir (Kecamatan Muara Badak, Marangkayu, Samboja, Anggana dan Muara Jawa).		Ha.	-	APBD II			Ha	-
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	CAKUPAN WILAYAH SUMBERDAYA PERIKANAN YANG DIAWASI			Kecam	12,000,000,000	APBD II			Kecamatan	1,100,000,000
					PERSENTASE KASUS ILEGAL DAN DESTRUKTIF FISHING YANG DITUNTASKAN.			Persen		APBD II			Persen	
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Difasilitasi			POKM	12,000,000,000				POKMASWAS	1,100,000,000

				dalam Kabupaten/Kota										
					Jumlah Reservat Diawasi		3	Reserv				3	Reservat	
					Jumlah Nelayan Mendapatkan Alat Tangkap Ramah Lingkungan		500	Nelaya				400	Nelayan	
				Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota							Sub Keg menghalami Pemutakhiran berganti nama			

				Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kutai Kartanegara.	100	Pelaku	11,900,000,000	APBD II	Sub Kegiatan Baru Hasil Pemutakhirabn dari Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	100	Pelaku Usaha	1,000,000,000
				Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota							Sub Keg menghalami Pemutakhiran berganti nama			

				Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Loa Kulu dan Tenggarong	10	Pelaku	100,000,000		Sub Kegiatan Baru Hasil Pemutakhiran dari Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	10	Pelaku Usaha	100,000,000
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan		25,09	Ton	10,300,000,000			27,668	Ton	5,900,000,000
					Eskpor Produk Kelautan dan Perikanan		1,687	Ton				1,860	Ton	
				Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan		10	Tanda	550,000,000	APBD II		10	Tanda Daftar Usaha	150,000,000

													a.	
				Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko.	Kec. Tenggarong, Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai.	1	Dokum	250,000,000			1	Dokumen	150,000,000
				Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Kec.Samboja, Muara Jawa, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Badak, Marangkayu, Tenggarong, Kota Bangun,	5	Rekom	300,000,000		Penambahan sub kegiatan sebagai percontohan unit pengolah yang berstadar Nasional			

						Muara Kaman, Muara Wis, Muara Muntai, Kenohan.								
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Yang Menerapkan Standar Mutu	Kec. Tenggarong, Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai.	15	Unit	500,000,000			15	Unit Usaha	250,000,000
				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan	Kec.Samboja, Muara Jawa, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Badak, Marangk					Sub Keg menghalami Pemutakhiran berganti nama			

					Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko.	ayu, Tenggarong, Kota Bangun, Muara Kaman, Muara Wis, Muara Muntai, Kenohan.								
				Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kec.Samboja, Muara Jawa, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Badak, Marangkayu, Tenggarong, Kota Bangun, Muara Kaman, Muara Wis, Muara Muntai, Kenohan.	15	Unit	500,000,000	APBD II	Sub Keg Hasil Pemutakhiran dari Sub Keg Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	15	Unit Usaha	500,000,000

				Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah POKLAHSAR Difasilitasi Sarana Pengolahan dan Pemasaran.		50	POKLA	9,250,000,000			25	POKLAHSAR	5,500,000,000
				Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Kec. Tenggarong, Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai.	50	Ton.	4,000,000,000		Pendukung Kegiatan Penanganan Stunting.	50	Ton	500,000,000
				Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi.	Kec. Tenggarong, Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara	50	Pelaku	5,250,000,000			50	Pelaku Usaha	5,000,000,000

						Badak, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai.								
				J U M L A H					166,680,443,487					83,674,308,130

RKPD focus pada pencapaian target kinerja Renstra yang periode pelaksanaannya berkurang sebagai akibat dari kebijakan Nasional yaitu pemilihan secara serentak sehingga input anggaran sangat dibutuhkan dalam pencapaian target. Input anggaran juga berdampak pada target yang juga harus ditarik mundur ke Tahun anggaran dibelakang perencanaan renstra. Fokus juga diarahkan kepada isu - isu dan rencana - rencana strategis daerah seperti kesiapan dalam menjadi lumbung pangan menyambut Kaltim sebagai IKN maka peningkatan produksi juga perlu dipersiapkan dengan menambah jumlah unit sarana pembudidayaan ika dan penangkapan ikan, menggenjot produksi udang windu dan rumput laut sebagai komoditas ekspor juga perlu ditingkatkan.

Dengan pencapaian target – terget program direktif Tahun 2024 maka pada Tahun 2025 fokus kepada pemenuhan target renstra seperti penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap dan pembuididayaan ikan, pengentasan kemiskinan nelayan dan pembudidaya berbasiskan data DTKS/ RBPK, Optimalisasi UPI, Patroli kelestarian ikan dan Sosiliasasi ilegal fishing, fasilitasi sarana nelayan dan pembudidaya ikan dalam mendukung kukar sebagai lumbung pangan kaltim.

Dinas Kelautan dan Perikanan menyadari bahwa sinergi perlu dibangun untuk mendukung perbaikan yang berkelanjutan dengan memperkuat implementasi RENSTRA sehingga pelaskanaan renstra dapat berjalan dinamis daengan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini, maka reviu terhadap renstra perlu dilaksanakan akan tetapi mengingat waktu yang sudah tidak memungkinkan untuk melasakanakan reviu maka penjelasan akan dituangkan kedalam evaluasi renstra. Renja akan menjadi rancu jika renstra sudah tidak dinamis oleh karena itu pada kesempatan ini disampaikan bahwa perubahann – perubahan yang terjadi didalam sub kegiatan sifatnya tidak berdampak secara langsung terhadap pencapaain target – target indikator kinerja utama Dislutkan, perubahan terjadi pada sub kegiatan skertariat.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Rencana 2025 merupakan periode keempat dalam pelaksanaan rencana strategis periode 2021-2026.Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih seperti tercantum dalam draft RPJMD 2021-2026 dan merupakan kewenangan kelautan dan perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam rangka mencapai target – target prioritas sampai dengan Tahun 2026 sebagai bagian dari percepatan akibat dari pemilihan kepala daerah serentak maka perubahan dan pergeseran anggaran penting untuk dilaksanakan untuk menyelesaikan target – target RENSTRA, ada beberapa target penting yang harus segera diselesaikan dianataranya pengentasan kemiskinan dalam data RBPK, pembangunan pertanian berbasis kawasan yang salah satunya memuat program fasilitasi 25,000 nelayan, pemberian fasilitas bagi nelayan dan pembudidaya sebagai bagian dari dukungan terhadap rencana kukar untuk menjadi lumbung pangan Kaltim.

Pengentasan kemiskinan pada Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil dan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil akan tetap menjadi target pelaksanaan hingga berakhirnya RENSTRA karena masih banyaknya nelayan miskin didalam DTKS, bahwa pelaksanaan kegiatan ini memberikan dampak ganda bagi pencapaian target yaitu sebagai lanjutan fasilitasi 25,000 nelayan dan pengentasan kemiskinan. Selain itu juga terdapat kegiatan – kegiatan pendukung 25,000 nelayan dan pembudidaya ikan aktif seperti penggantian alat tangkap ramah lingkungan, fasilitasi UPI dalam pengoptimalisasiannya seperti bimtek, sertifikasi dan bedah UPI.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Rencana 2025 ini merupakan pedoman/acuan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegar dalam menjalankan tugas dan fungsi serta cerminan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Rencana 2025 dalam mewujudkan visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun rencana 2025 akan sangat dipengaruhi oleh peran dan tanggungjawab seluruh komponen organisasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan, serta *stakeholder* yang terkait.

aa.RENJA DINAS KOPERASI DAN UKM

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan merupakan Rencana Kerja Tahunan yang paralel dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan yang penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi peAmangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan kegiatan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk mencapai keterpaduan Rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mengacu pada Undang - Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dan Pasal 3 ayat (2) bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Disebutkan juga dalam Pasal 3 ayat (3) Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu dalam mengimplementasikan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut maka setiap tahun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD atau sekarang dikenal dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Renja SKPD/OPD, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang

diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD/OPD.

Renja OPD merupakan Dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengopersionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap OPD untuk memiliki Rencana Kerja (Renja – OPD) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tahun 2025, dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara.

2. Tujuan

Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja-PD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja-PD, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renja-PD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renja-PD.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

Dalam bab ini memuat struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73)

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam Bab ini dipaparkan rumusan Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan penjabaran dari visi dengan lebih spesifik dan terukur yang dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai dengan uraian program dan kegiatan yang merupan panjabaran dari strategi dan kebijakan yang diambil dalam mewujudkan tujuan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini dipaparkan / dikemukakan rencana kerja pendanaan program dan kegiatan, indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara;

BAB V. PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja tahun ke III yang merupakan tunan dari rencana strategis yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2021-2026;

Terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong diantaranya keterhambatan beberapa kerbatasan cara berinovasi dari sumber daya mananusia yang ada, maping data yang belum maksimal, dan belum terdapat penyusunan roadmap yang pasti untuk menajankan program kegiatan yang ada. yang menjadi pendorong adalah terlaksanya seluruh program kegiatan sehingga tercapai pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan / program / kegiatan.

Maka dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 diperlukan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel (T.C 29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama OPD : Dinas Koperasi dan UKM

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2.17					**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**									
2.17	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	80,00	71,79	70,00	85,40	122%	70	73	91,25%
	01	2	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan**	**20**	8	4	4	100%	4	16	80,00%

						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5	2	1	1	100%	1	4	80,00%
	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	15	6	3	3	100%	3	12	80,00%
	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel**	**10**	4	2	2	100%	2	8	80,00%
	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60	24	12	12	100%	12	48	80,00%
	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	5	2	1	1	100%	1	4	80,00%
	01	2	03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi**	**5**	2	1	1	100%	1	4	80,00%
	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD	5	2	1	1	100%	1	4	80,00%
	01	2	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**5**	2	1	1	100%	1	4	80,00%

	01	2	05		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya bagi Pegawai	318	0	142	142	0%	0	142	44,65%
	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150	30	30	30	100%	30	90	60,00%
	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta yang mengikluti Sosialisasi	60	30	0	0	0%	0	30	50,00%
	01	2	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**34,28%**	54,63%	**100,00%**	54,63%	75,00%	75,00%	75,00%
	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Penerangan Kantor	48	12	12	12	100%	12	36	75,00%
	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumalah ATK	225	90	45	45	100%	45	180	80,00%
	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95	38	19	19	100%	19	76	80,00%
						Jumlah Porsi Makan dan Minum	4000	1300	800	800	100%	800	2900	72,50%
	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41	14	7	7	100%	9	30	73,17%

	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1160	446	250	250	100%	250	946	81,55%
	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Sarana dan prasarana Arsip pada SKPD	27	17	5	5	100%	5	27	100,00%
	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	8	4	2	2	100%	2	8	100,00%
	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	2	1	1	100%	1	4	80,00%
	01	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**35,85%**	**55,97%**	**100,00%**	55,97%	**74,84%**	**74,84%**	**74,84%**
	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	159	57	32	32	100%	30	119	74,84%
	01	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang**	**100%**	**24,16%**	**46,14%**	**100,00%**	46,14%	68,12%	68,12%	68,12%

						Pemerintahan Daerah								
	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	981	218	218	218	100%	218	654	66,67%
	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Pembayaran rekening	60	24	12	12	100%	12	48	80,00%
	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	24	12	12	100%	12	48	80,00%
	01	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**40,19%**	**60,36%**	**100,00%**	60,36%	80,35%	80,35%	80,35%
	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	125	50	25	25	100%	25	100	80,00%
	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140	50	30	30	100%	30	110	78,57%
	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5512	2222	1110	1110	100%	1100	4432	80,41%

2.17	**02**				**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase Koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam**	75,6%	45,90%	53,30%	0,00%	0%	60,70%	60,70%	80,34%
2.17	*02*	*2*	*01*		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Simpan Koperasi	100%	**20,00%**	**20,00%**	**0,00%**	20,00%	**40,00%**	**40,00%**	40,00%
2.17	*02*	*2*	*01*	*01*	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang di Fasilitasi	50	10	10	0	0%	10	10	20,00%
2.17	**03**				**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Kepatuhan Koperasi Melaksanakan RAT**	**27,24%**	15,56%	19,46%	20,98%	107,81%	21,40%	21,40%	78,57%
2.17	03	2	01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi**	**83,87%**	**43,93%**	**67,89%**	**67,89%**	100,00%	**75,88%**	75,88%	90,47%
2.17	03	2	01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta	Jumlah Pengawasan Koperasi	200	125	150	150	100%	175	175	87,50%

					Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang didampingi RAT	30	10	15	15	100%	20	20	66,67%
2.17	03	2	01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Koperasi	325	150	275	275	100%	300	300	92,31%
						Jumlah Fasilitasi Pembubaran Koperasi	25	0	5	5	100%	15	15	60,00%
2.17	**04**				**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi KSP/USP berkatagori Sehat dan Cukup Sehat**	**18,52%**	3,70%	7,41%	7,41%	100,00%	11,11%	11,11%	59,99%
2.17	04	2	*01*		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP	180	53	150	150	100%	160	160	88,89%
2.17	04	2	01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan sertifikat penilaian	90	53	75	75	100%	80	80	88,89%
2.17	04	2	01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan koperasi	90	0	75	75	100%	80	80	88,89%
2.17	**05**				**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase Pengurus dan Pengawas yang memiliki sertifikat pelatihan Perkoperasian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%

2.17	*05*	*2*	*01*		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	**405**	90	90	90	100%	90	210	51,85%
2.17	05	2	01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta yang dilatih	810	252	180	180	100%	254	686	84,69%
2.17	**06**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase meningkatnya Aset Koperasi**	**4,86%**	0,97%	1,95%	4,66%	239%	2,92%	2,92%	60,04%
						Persentase meningkatnya Volume Usaha (Omset) Koperasi	**4,86%**	0,97%	1,95%	3,14%	161%	2,92%	2,92%	60,04%
2.17	*06*	*2*	*01*		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	60	25	40	40	100%	50	50	83,33%
2.17	*06*	*2*	*01*	*01*	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang di Fasilitasi	60	25	40	40	100%	50	50	83,33%
2.17	**07**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase UMKM yang telah difasilitasi**	**9,77%**	1,18%	1,99%	2,38%	120%	1,99%	5,55%	56,81%

2.17	*07*	*2*	*01*		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Jumlah UMKM yang di berdayakan**	**5504**	1140	1121	1121	100,00%	1121	3382	61,45%
2.17	07	2	01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi Usaha Mikro	3	1	1	1	100%	1	3	100,00%
2.17	07	2	01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Pendampingan Pelaku Usaha	80	0	20	20	100%	20	40	50,00%
2.17	07	2	01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah umkm yang difasilitasi kemudahan perizinan usaha	700	140	240	240	100%	140	520	74,29%
2.17	07	2	01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Peserta Pelatihan	2400	660	480	480	100%	480	1620	67,50%
						Pelatihan Wirausaha baru	1200	180	240	240	100%	240	660	55,00%
2.17	07	2	01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengakses Permodalan	640	160	160	160	100%	120	440	68,75%
						Pendampingan Pembentukan dan Fasilitasi Sarana Prasarana Klinik Klinik K-UMKM	13	1	3	3	100%	3	7	53,85%
2.17	**08**				**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Pertumbuhan Omset UMKM**	**1,4%**	0,70%	0,60%	1,35%	225%	1,10%	1,10%	77,47%

2.17	*08*	*2*	*01*		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil**	**Jumlah Pengembangan Usaha Mikro**	1700	363	718	718	100%	320	1038	61,06%
2.17	08	2	01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Pelaku Usaha Yang difasilitasi akases Pemasaran	600	143	120	120	100%	120	240	40,00%
						Jumlah Pelaku Usaha yang dilatih Kemasan, dan bantuan sarana prasarana	1100	220	598	598	100%	200	798	72,55%
						Jumlah Event yang diikuti	17	1	10	10	100%	10	20	117,65%

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dengan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sasaran Strategis Dinas Koperasi dan UKM sebagai berikut :

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Koperasi dan UKM;
2. Meningkatnya UMKM Wirausaha Baru;
3. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi;
4. Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro

Pada tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah melaksanakan 8 Program dengan capaian kinerja Organisasi yang dapati dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 8 Kegiatan 21 Sub Kegiatan yang berisikan kegiatan rutin Perkantoran pada setia Perangkat Daerah, dengan rata-rata capaiannya Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 85,40 %

2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

   Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam ada 1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan yang berisikan kegiatan fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, capaiannya rata-rata 0% Dikarenakan Adanya Regulasi Perizinan Simpan Pinjam Sebagaimana Surat Edaran No. 11 Tahun 2022 Tentang Moratorium Perizinan Simpan Pinjam Koperasi Tanggal 17 November 2022

3. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

   Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi ada 1 Kegiatan, 2 sub kegiatan, yang berisikan kegiatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota dan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten / kota dengan capainnya 100%

4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;

   Program Peneilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi ada 1 Kegiatan, 2 sub kegiatan yang berisikan pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota dan penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota dengan rata-rata capaiannya 100%

5. Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian

   Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian ada 1 Kegiatan, 1 sub kegiatan yang berisikan kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota untuk peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi dengan rata-rata pencapaianya Program 100%

6. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

   Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi ada 1 Kegiatan, 1 sub kegiatan dengan kegiatan yang dilaksanakan pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, sandarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten/kota, dengan rata-rata pencapaianya 100%

7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm)

   Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm) ada 1 Kegiatan dan 5 sub Kegiatan, Adapun Kegiatannya pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro, dengan rata-rata pencapaiannya 100%

8. Program Pengembangan UMKM

   Program Pengembangan Pengembangan UMKM dengan 1 kegiatan, 1 sub kegiatan yang kegiatannya fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Design dan Teknologi, dengan tingkat capaianya 100 %

Capaian kinerja pelayanan OPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan indikator kinerja, untuk uraian terhadap pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara detailnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 (T-C.30)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase Koperasi yang berkualilas	-	-	7,00%	10,00%	13,00%	16,00%	19,00%	8,87%	50,63%	13,00%	13,00%	Naiknya pesersentase Aset/Omset Koperasi
2	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	-	-	11,89%	12,24%	12,59%	12,94%	13,28%	12,01%	73,82%	12,59%	12,59%	Naiknya Persentase Usaha Mikro yang Berwirausaha
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	68	70	73	77	80	85,4		73	77	
4	Persentase Koperasi Aktif	-	-	82,53%	82,59%	82,62%	82,64%	82,67%	82,49%	83,05%	82,62%	82,64%	Pembinaan Kepada Koperasi dalam menjaga Konsistensi Koperasi Aktif

5	Persentase Kepatuhan Koperasi Melaksanakan RAT	-	-	15,56%	19,46%	21,40%	23,35%	27,23%	18,96%	20,98%	21,40%	23,35%	Pendampingan Koperasi agar Melaksanakan RAT
6	Persentase Koperasi KSP/USP berkatagori Sehat dan Cukup Sehat	-	-	3,70%	7,41%	11,11%	14,81%	18,52%	18,52%	29,19%	11,11%	14,81%	Penilaian Koperasi KSP/USP berkatagori Sehat dan Cukup Sehat
7	Persentase Pengurus dan Pengawas yang memiliki sertifikat pelatihan Perkoperasian	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
8	Persentase Koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam	-	-	45,93%	53,33%	60,74%	68,10%	75,60%	66,67%	0,00%	60,74%	60,74%	Pendampingan Koperasi untuk legalitas ijin simpan pinjam
9	Persentase meningkatnya Aset Koperasi	-	-	0,97%	1,95%	2,92%	3,89%	4,86%	2,14%	3,76%	2,92%	3,89%	Pendampingan dan pemberdayaan Koperasi dan Menjalankan usahanya

10	Persentase meningkatnya Omset Koperasi	-	-	0,97%	1,95%	2,92%	3,89%	4,86%	2,14%	4,66%	2,92%	3,89%	Pendampingan dan pemberdayaan Koperasi dan Menjalankan usahanya
11	Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	-	-	0,35%	0,44%	0,46%	0,94%	1,01%	42,23%	0,44%	0,94%	0,94%	
12	Persentase UMKM yang telah difasilitasi	-	-	1,81%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	3,01%	2,38%	1,99%	1,99%	Fasilitasi UMKM dengan memberikan Akses Permodalan, Pelatihan, Pasar, promosi dan Bantuan
13	Pertumbuhan Omset UMKM	-	-	0,28%	0,57%	0,85%	1,10%	1,40%	0,70%	1,35%	0,85%	0,85%	Fasilitasi UMKM dengan memberikan Akses Permodalan, Pelatihan, Pasar, promosi dan Bantuan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dengan melihat kondisi dari tingkat capaian pelayanan sebagaimana di atas, terdapat beberapa isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu :

a. Masih rendahnya likuiditas KSP/USP.
b. Masih rendahnya pemahaman pengelola KSP/USP – Koperasi dalam mengelola kegiatan koperasi.
c. Masih rendahnya manajemen dan daya saing produk UMKM.
d. Kurangnya pertumbuhan dan wirausaha baru terutama UMKM.
e. Masih adanya koperasi yang tidak aktif (beku).
f. Rendahnya ketrampilan manajemen pengurus koperasi.
g. Rendahnya ketrampilan pengawas dalam bidang pengawasan.
h. Rendahnya manajemen usaha, seringkali ada yang belum melakukan pemisahan antara bisnis/usaha dan rumah tangga.
i. Belum memiliki legitimasi tempat usaha, belum memiliki legitimasi hukum atas asset, sehingga terjadi kesulitan dalam mengakses kredit perbankan.
j. Rendahnya kualitas SDM Pembina, sehingga pola kemitraan sulit diterapkan baik di bidang produksi, pemasaran maupun teknologi.
k. Rendahnya pemahaman kelompok masyarakat dalam membentuk lembaga Keuangan Mikro (LKM).
l. Kurang berfungsinya Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kukar.
m. Belum ada wadah/forum untuk menaungi urusan UMKM yang menjadi binaan tiap-tiap OPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Paparan dalam membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 (T.C 31)

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskop-UKM	77	13.831.703.059	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskop-UKM	77	13.831.703.059	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Diskop-UKM	10 Dokumen	1.000.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Diskop-UKM	10 Dokumen	1.000.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskop-UKM	3 Dokumen	450.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskop-UKM	3 Dokumen	450.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskop-UKM	3 Laporan	50.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskop-UKM	3 Dokumen	50.000.000	

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskop-UKM	2 Laporan	150.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskop-UKM	2 Laporan	150.000.000	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Diskop-UKM	1 Dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Diskop-UKM	1 Dokumen	50.000.000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Diskop-UKM	1 Data	250.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Diskop-UKM	1 Data	250.000.000	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskop-UKM	1 Berita Acara	50.000.000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskop-UKM	1 Berita Acara	50.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	Diskop-UKM	2 Laporan	9.435.997.899	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	Diskop-UKM	2 Laporan	9.435.997.899	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Diskop-UKM	1050 Orang/bulan	9.281.556.899	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskop-UKM	1050 Orang/bulan	9.281.556.899	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	25.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	104.441.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	104.441.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Diskop-UKM	1 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Diskop-UKM	1 Dokumen	25.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Diskop-UKM	3 Laporan	105.000.000	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Diskop-UKM	3 Laporan	105.000.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Diskop-UKM	1 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Diskop-UKM	1 Dokumen	25.000.000	

Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	50.000.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	30.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	30.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskop-UKM	100%	50.000.000	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskop-UKM	1 Dokumen	50.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Diskop-UKM			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Diskop-UKM			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Diskop-UKM	30 Orang	50.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Diskop-UKM	30 Orang	50.000.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Diskop-UKM			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Diskop-UKM			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskop-UKM	100%	607.512.000	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskop-UKM	100%	607.512.000	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Paket	10.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Paket	10.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Paket	72.398.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Paket	72.398.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	2 Paket	50.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	2 Paket	50.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Diskop-UKM	2 Paket	50.000.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Diskop-UKM	2 Paket	50.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Dokumen	25.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Dokumen	25.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	250.064.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	250.064.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Diskop-UKM	1 Dokumen	75.050.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Diskop-UKM	1 Dokumen	75.050.000	

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Diskop-UKM	1 Dokumen	75.000.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Diskop-UKM	1 Dokumen	75.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Diskop-UKM	100%	469.655.000	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Diskop-UKM	100%	469.655.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Diskop-UKM	45 unit	469.655.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Diskop-UKM	45 unit	469.655.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Diskop-UKM	100%	1.152.838.160	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Diskop-UKM	100%	1.152.838.160	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskop-UKM			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskop-UKM			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Diskop-UKM	3 Laporan	393.399.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Laporan	393.399.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Laporan	759.439.160	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Laporan	759.439.160	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskop-UKM	100%	1.010.700.000	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskop-UKM	100%	1.010.700.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Diskop-UKM	22 unit	180.700.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Diskop-UKM	22 unit	180.700.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Diskop-UKM	30 unit	30.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Diskop-UKM	30 unit	30.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Diskop-UKM	4 Unit	800.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Diskop-UKM	4 Unit	800.000.000	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Kepatuhan Koperasi yang melaksanakan RAT	Kab. Kutai Kartanegara	23,35%	690.000.000	Persentase Kepatuhan Koperasi yang melaksanakan RAT	Kab. Kutai Kartanegara	23,35%	690.000.000	
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pesentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	75,88%	690.000.000	Pesentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	75,88%	690.000.000	

Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara , Luar Daerah	210 Unit Usaha	415.000.000	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara , Luar Daerah	210 Unit Usaha	415.000.000	Fasilitasi Pendampingan Koperasi ASN
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kab. Kutai Kartanegara , Luar Daerah	300 Unit Usaha	275.000.000	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kab. Kutai Kartanegara , Luar Daerah	300 Unit Usaha	275.000.000	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi KSP/USP Berkatagori Sehat dan Cukup Sehat	Kab. Kutai Kartanegara	14,81%	1.125.000.000	Persentase Koperasi KSP/USP Berkatagori Sehat dan Cukup Sehat	Kab. Kutai Kartanegara	14,81%	1.125.000.000	
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP	Kab. Kutai Kartanegara	170 Unit Usaha	1.125.000.000	Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP	Kab. Kutai Kartanegara	170 Unit Usaha	1.125.000.000	
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara , Luar Daerah	85Unit Usaha	125.000.000	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara , Luar Daerah	85Unit Usaha	125.000.000	
Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko,	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara , Luar Daerah	85 Unit Usaha	1.000.000.000	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara , Luar Daerah	85 Unit Usaha	1.000.000.000	Penghargaan/Pemeringkatan Koperasi dan Peringatan Hari Koperasi Nasional

Kinerja Keuangan, dan Permodalan									
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengrus dan Pengawas yang memiliki sertfikat petihan perkoperasian	Kab. Kutai Kartanegara	100,00%	300.000.000	Persentase Pengrus dan Pengawas yang memiliki sertfikat petihan perkoperasian	Kab. Kutai Kartanegara	100,00%	300.000.000	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Kab. Kutai Kartanegara	90 Koperasi	300.000.000	Jumlah koperasi yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Kab. Kutai Kartanegara	90 Koperasi	300.000.000	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	1. Muara Kaman, Sabintulung 2. Sebulu, Sebulu Ilir 3. Kenohan, Teluk Bingkai 4. Kembang Janggut, Muai 5. Tenggarong	180 orang	300.000.000	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	1. Muara Kaman, Sabintulung 2. Sebulu, Sebulu Ilir 3. Kenohan, Teluk Bingkai 4. Kembang Janggut, Muai 5. Tenggarong	180 orang	300.000.000	
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam	Kab. Kutai Kartanegara			Persentase Koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam	Kab. Kutai Kartanegara			

Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peneributan Izin Usaha Simpan Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara			Cakupan Peneributan Izin Usaha Simpan Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara			
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara			
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya Aset Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	3,89%	1.300.000.000	Persentase meningkatnya Aset Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	3,89%	1.300.000.000	
	Persentase meningkatnya Omzet Koperasi		3,89%		Persentase meningkatnya Omzet Koperasi		3,89%		
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	55 Koperasi	1.300.000.000	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	150 Unit Usaha	1.300.000.000	

Peningkatan Produktivitas, NilaiTambah, Akses Pasar, AksesPembiayaan, PenguatanKelembagaan, PenataanManajemen, Standarisasi, danRestrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yangProduktif, Bernilai Tambah,Memiliki Akses Pasar, AksesPembiayaan, PenguatanKelembagaan, PenataanManajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Loa Kulu , Tenggarong , Sebulu , Muara Kaman , Tenggarong Seberang ,Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara Luar Daerah	150 Unit Usaha	1.300.000.000	Jumlah Unit Usaha yangProduktif, Bernilai Tambah,Memiliki Akses Pasar, AksesPembiayaan, PenguatanKelembagaan, PenataanManajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Loa Kulu , Tenggarong , Sebulu , Muara Kaman , Tenggarong Seberang ,Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara Luar Daerah	150 Unit Usaha	1.300.000.000	Penguatan Pengetahuan SDM dan Kelembagaan Bagi Koperasi Sektor Pertanian Dalam Arti luas (Dedikasi Bupati)
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang telah difasilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	1,99%	3.550.000.000	Persentase UMKM yang telah difasilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	1,99%	3.550.000.000	
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang di Berdayakan	Kab. Kutai Kartanegara	16.968 UMKM	3.550.000.000	Jumlah UMKM yang di Berdayakan	Kab. Kutai Kartanegara	16.968 UMKM	3.550.000.000	
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Kab. Kutai Kartanegara	15.000 Unit Usaha	1.055.000.000	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Kab. Kutai Kartanegara	15.000 Unit Usaha	1.055.000.000	

Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	120 Unit Usaha	200.000.000	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	120 Unit Usaha	200.000.000	
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	1. Muara Kaman, Puan Cepak 2. Samboja, Argosari 3. Muara Muntai 4. Kota Bangun 5. Muara Jawa 7. Loa Janan 8. Muara Badak 9. Tenggarong 10. Kenohan 11, Tenggarong Seberang	1.160 Unit Usaha	720.000.000	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	1. Muara Kaman, Puan Cepak 2. Samboja, Argosari 3. Muara Muntai 4. Kota Bangun 5. Muara Jawa 7. Loa Janan 8. Muara Badak 9. Tenggarong 10. Kenohan 11, Tenggarong Seberang	1.160 Unit Usaha	720.000.000	Faslitasi Halal Program Usaha Kecil Idaman, Stunting

Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1. Kelurahan Dondang, Muara Jawa 2.kelurahan tama, pole muara jawa 3. Prangat Baru, Marang Kayu 4. Jantur Baru, Muara Muntai 5. Kayu Batu, Muara Muntai 6. Sanga-Sanga Dalam, Sanga-Sanga 7. Sari Jaya, Sanga-Sanga 8. Kab. Kutai Kartanegara	588 Unit Usaha	1.425.000.000	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1. Kelurahan Dondang, Muara Jawa 2.kelurahan tama, pole muara jawa 3. Prangat Baru, Marang Kayu 4. Jantur Baru, Muara Muntai 5. Kayu Batu, Muara Muntai 6. Sanga-Sanga Dalam, Sanga-Sanga 7. Sari Jaya, Sanga-Sanga 8. Kab. Kutai Kartanegara	588 Unit Usaha	1.425.000.000	Program Usaha Kecil Idaman, Program Dedikasi (Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN), Stunting

		9. Luar Daerah				9. Luar Daerah			
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Muara Badak , Tenggarong , Kota Bangun , Muara Kaman , Samboja , Tenggarong Seberang, Muara Muntai , Loa Janan , Sebulu ,	100 Orang	150.000.000	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Muara Badak , Tenggarong , Kota Bangun , Muara Kaman , Samboja , Tenggarong Seberang, Muara Muntai , Loa Janan , Sebulu ,	100 Orang	150.000.000	Program Usaha Kecil Idaman, Pembentukan dan pemberdayaan Kinik K-UKM di Kecamatan

		Marang Kayu				Marang Kayu			
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Omzet UMKM	Kab. Kutai Kartanegara	1,10%	2.850.000.000	Pertumbuhan Omzet UMKM	Kab. Kutai Kartanegara	1,10%	2.850.000.000	
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	380 Unit Usaha	2.850.000.000	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	320 Unit Usaha	2.850.000.000	
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Loa Janan , Anggana , Kenohan , Tenggarong Seberang , Muara Wis, Muara Badak , Tenggarong , Sanga-Sanga, Prov. Kalimantan Timur ,	380 Unit Usaha	2.850.000.000	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Loa Janan , Anggana , Kenohan , Tenggarong Seberang , Muara Wis, Muara Badak , Tenggarong , Sanga-Sanga, Prov. Kalimantan Timur ,	380 Unit Usaha	2.850.000.000	Program Usaha Kecil Idaman

		KAB. KUTAI KARTANEGARA , Luar Daerah				KAB. KUTAI KARTANEGARA , Luar Daerah			
JUMLAH				23.646.703.059				23.646.703.059	

Hasil analisa kebutuhan merupakan usulan Program/kegiatan berdasarkan pagu yang diberikan pada saat Forum Perangkat Daerah, sehingga terdapat perbedaan rincian dengan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, perbedaan terebut pada besaran anggaran tiap kegiatan, juga terdapat perbedaan pada rincian Output serta jumlah target kegiatan;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun ini Pembahasan dilakukan terlebih dahulu pengentrian usulan pada SIPD-RI sebagai bahan Pembahaan yang kemudian Rancangan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM didiskusikan dalam pembahaan Forum OPD Kabupaten Kutai Kartanegara dan pembahaan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan Kesepakatan hasil Musrenbang.

Pada Pembahasan di Forum OPD ada beberapa Program/Kegiatan/Subkegiatan yang ditujukan kepada Dinas Koperasi dan UKM, usulan dari pemangku kepentingan tersaji dalam Tabe berikut ini.

Tabel 2.4 (TC 3.2)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Sabintulung	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30 Orang	Murenbang Kecamatan
2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta	Teluk Bingkai		30 Orang	Murenbang Kecamatan

	Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				
3	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Sebulu Ilir		30 Orang	Murenbang Kecamatan
4	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Muai		30 Orang	Murenbang Kecamatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
1	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Puan Cepak	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan
2	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Argo Sari		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan
3	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dondang	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhdap Usaha Mikro	30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan
4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tama Pole		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan
5	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Prangat Baru		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan
6	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jantur Baru		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan
7	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kayu Batu		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan
8	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Sanga-Sanga Dalam		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan
9	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan	Sari Jaya		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan

	Pengembangan Usaha Mikro				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN UKM

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah membawa perubahan sistem Pemerintahan Indonesia yang sentralistis ke arah desentralistik.

Dan bila dikaitkan dengan Urusan di Bidang Koperasi dan UKM maka Pemberdayaan Koperasi dan UKM, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro poor). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (pro growth). Keberadaan Koperasi dan UKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka pertuasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran

Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi dan UKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekatipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UKM merupakan leader perekonomian Indonesia. Ia menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan

Beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Propinsi berkaitan dengan pengembangan Koperasi dan UKM:

Kebijakan Nasional Urusan Koperasi dan UKM yang utama sebagai berikut :

1. Mewujudkan Koperasi Modern yang berdaulat, mandiri, dan maju dengan Fokus Kontribusi PDB sector Koperasi, Mewujudkan Koperasi Model Baru dan Modern, Pertumbuhan Stat-Up berbasis Koperasi;

2. Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang berdaulat mampu bersaing di Pasar Domestik dan Global dengan Focus, Kontribusi PDB di sector UMKM, Nilai Ekspor UMKM, Nilai Investasi UMKM, UKM Naik Kelas, Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM, Rasio Kewirausahaan;

Kebijakan Propinsi Urusan Koperasi dan UKM yang utama sebagai berikut :

Meningkatkan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM, melalui Sumbangan Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB dengan focus menciptakan Koperasi Unggulan, dan UKM Unggulan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

3.2.1 Tujuan

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih dengan Fokus Pembangunan Tahun 2025 dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dapat diuraikan Tujuan dan sasarannya sebagai berikut :

1. Tujuan Pertama, Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Tujuan Kedua, Meningkatnya Produktifitas melalui Pemberdayaan dan Penguatan Kualitas Koperasi dan UMKM dengan Fokus Memberdayakan dan menguatkan usaha mikro dan koperasi terutama dari Kelembagaan, akses permodalan, manajemen usaha, teknologi Produksi, Informasi, dan pemasaran;

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang ditetapkan yaitu 5 (lima) tahun.

Pencapaian tujuan dan sasaran merupakan sebuah rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakn secara operasional dengan memperhatikan, ketersediaan sumber daya organisasi.

3.2.2 Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut maka Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sasaran yang akan dicapai sebagai berikut

1. Sasaran Pertama, Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Diskop UKM;
2. Sasaran Kedua, Mempertahankan Jumlah Koperasi Aktif, dengan indikator Persentase Koperasi Aktif;
3. Sasaran Ketiga, Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha, dengan Indikator Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha;
4. Sasaran Keempat, Pengembangan Usaha bagi masyarakat miskin berdasarkan Basis Data Terpadu Kemiskinan dan berbasis teknologi informasi, Indikatornya Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha bagi masyarakat miskin berdasarkan Basis Data Terpadu Kemiskinan dan berbasis teknologi informasi

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Satuan	Kondisi Awal	INDIKATOR				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi dan UMKM	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Diskop UKM	Predikat Akutanbilitas Kinerja	Persentase	67.76	71,94%	70%	73%	77%	80%
2	Meningkatnya Produktifitas melalui Pemberdayaan dan Penguatan Kualitas Koperasi dan UMKM	Meningkatnya Kualitasi Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang meningkat Kualitasnya	Persentase	4%	7%	10%	13%	16%	19%
			Persentase Koperasi yang Aktif	Persentase	82%	82%	82%	82%	82%	82%
			Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persentase	12%	12,57%	12,75%	12,93%	13,11%	13,28%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Fokus / Tema Pembangunan Kutai Kartanegara “Memperkuat Landasan Bagi Percepatan (Akselerasi) dan Pembaharuan (Transformasi) Pembangunan Berbasis Potensi Kewilayahan dan Komoditi Unggulan Daerah;
2. Mendukung VIsi dan Misi Kepala Daerah terpilih dalam Visi Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia, dengan Misi Kepala Daerah terpilih :

Dalam Rencana Kerja Tahun 2025 ini Dinas Koperasi memperhatikan berbagai Regulasi dan memastikan Sinkronisasi Substansi dan Proses dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana amanat dari Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05.05.889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

perencanaan pembangunan dan keuangan daerah mempunya amat bertanggung jawab dalam menyusun program, yang berpedoman pada kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan, keuangan daerah;
Dalam mencapai target perangkat daerah yang termuat pada Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mengah Kabupaten Kutai Kartanegara akan menjalankan tugas dan Fungsi sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Perumusan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mengah Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Rincian dan Jumlah Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
7. Program Pengembangan UMKM

Tabel 4.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH TAHUN 2025 DAN TAHUN MAJU 2026

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Diskop-UKM	77	13.831.703.059			80.00	11.811.090.432
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencanam Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskop-UKM	6 Dokumen	1.000.000.000	Apbd		4 Dokumen	290.000.000
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskop-UKM	3 Dokumen	450.000.000	Apbd		2 Dokumen	100.000.000
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Diskop-UKM	3 Dokumen	50.000.000	Apbd		3 Dokumen	190.000.000

		dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskop-UKM	2 Laporan	150.000.000	Apbd			
2.17.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Diskop-UKM	1 Dokumen	50.000.000	Apbd			
2.17.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Diskop-UKM	1 Data	250.000.000	Apbd			
2.17.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskop-UKM	1 Berita Acara	50.000.000	Apbd			
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	Diskop-UKM	2 Dokumen	9.435.997.899	Apbd			9.087.187.060
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Diskop-UKM	1050 Orang/bulan	9.281.556.899	Apbd		75 Orang/bulan	8.982.743.077

2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	25.000.000	Apbd			
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	104.441.000	Apbd		1 Laporan	104.443.983
2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Diskop-UKM	1 Dokumen	25.000.000	Apbd			
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Diskop-UKM	1 Laporan	105.000.000	Apbd		1 Laporan	93.926.000
2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Diskop-UKM	1 Dokumen	25.000.000	Apbd		1 Laporan	93.926.000

2.17.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	50.000.000	Apbd			
2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	30.000.000	Apbd			
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskop-UKM	100%	50.000.000	Apbd		1 Dokumen	125.000.000
2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Diskop-UKM			Apbd		106 Stel	75.000.000
2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Diskop-UKM	30 Orang	50.000.000	Apbd		30 Orang	50.000.000
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskop-UKM	100%	607.512.000	Apbd		100%	555.114.000
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Diskop-UKM	1 Paket	10.000.000	Apbd		1 Paket	10.000.000

		Bangunan Kantor yang Disediakan							
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Paket	72.398.000	Apbd		1 Paket	70.000.000
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	2 Paket	50.000.000	Apbd		1 Paket	50.000.000
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Diskop-UKM	2 Paket	50.000.000	Apbd		1 Paket	50.000.000
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Dokumen	25.000.000	Apbd		1 Dokumen	25.000.000
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	250.064.000	Apbd		1 Laporan	250.064.000
2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Diskop-UKM	1 Dokumen	75.050.000	Apbd		1 Dokumen	75.050.000
2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Diskop-UKM	1 Dokumen	75.000.000	Apbd		1 Dokumen	25.000.000

		Berbasis Elektronik pada SKPD							
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Diskop-UKM	100%	469.655.000	Apbd		100%	249.294.920
2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Diskop-UKM	45 unit	469.655.000	Apbd		30 unit	249.294.920
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Diskop-UKM	100%	1.152.838.160	Apbd		100%	914.696.592
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1 Laporan	2.398.000
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Laporan	393.399.000	Apbd		1 Laporan	152.859.432
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Laporan	759.439.160	Apbd		1 Laporan	759.439.160

2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskop-UKM	100%	1.010.700.000	Apbd		100%	495.871.860
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Diskop-UKM	22 unit	180.700.000	Apbd		25 unit	180.700.000
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Diskop-UKM	30 unit	30.000.000	Apbd		20 unit	30.000.000
2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Diskop-UKM	4 Unit	800.000.000	Apbd		3 Unit	285.171.860
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Kepatuhan Koperasi yang melaksanakan RAT	Kab. Kutai Kartanegara	23,35%	690.000.000	Apbd		27,24%	550.000.000

2.17.03.02.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pesentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	75,88%	690.000.000	Apbd		83,87%	550.000.000
2.17.03.02.01. 0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara , Luar Daerah	210 Unit Usaha	415.000.000	Apbd	Fasilitasi Pembentukan/Pendam pingan Koperasi ASN	230 Unit Usaha	225.000.000
2.17.03.02.01. 0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kab. Kutai Kartanegara , Luar Daerah	300 Unit Usaha	275.000.000	Apbd		330 Unit Usaha	325.000.000
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi KSP/USP Berkatagori Sehat dan Cukup Sehat	Kab. Kutai Kartanegara	14,81%	1.125.000.000	Apbd		18,82%	220.000.000
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP	Kab. Kutai Kartanegara	170 Unit Usaha	1.125.000.000	Apbd		180 Unit Usaha	220.000.000

	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara, Luar Daerah	85Unit Usaha	125.000.000	Apbd		90 Unit Usaha	130.000.000
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara, Luar Daerah	85 Unit Usaha	1.000.000.000	Apbd		90 Unit Usaha	90.000.000
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengrus dan Pengawas yang memiliki sertfikat petihan perkoperasian	Kab. Kutai Kartanegara	100,00%	300.000.000			100,00%	300.000.000
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Kab. Kutai Kartanegara	90 Koperasi	300.000.000	Apbd		90 Koperasi	300.000.000

2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	1. Muara Kaman, Sabintulung 2. Sebulu, Sebulu Ilir 3. Kenohan, Teluk Bingkai 4. Kembang Janggut, Muai 5. Tenggarong	180 orang	300.000.000	Apbd		180 orang	300.000.000
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam	Kab. Kutai Kartanegara	0,0%	0	Apbd		75,6%	100.000.000
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peneributan Izin Usaha Simpan Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	0%	-	Apbd		100%	100.000.000

2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	0 Unit Usaha	-	Apbd	Program Ini Ditiadakan Karena Adanya Regulasi Terkait Dengan Perizinan Simpan Pinjam Sebagaimana Surat Edaran No. 11 Tahun 2022 Tentang Moratorium Perizinan Simpan Pinjam Koperasi Tanggal 17 November 2022	10 Unit Usaha	100.000.000
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya Aset Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	3,89%	1.300.000.000	Apbd		4,86%	800.000.000
		Persentase meningkatnya Omzet Koperasi		3,89%				4,86%	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	55 Unit Usaha	1.300.000.000	Apbd		60 Unit Usaha	800.000.000
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan	Loa Kulu , Tenggarong , Sebulu , Muara Kaman , Tenggarong	150 Unit Usaha	1.300.000.000	Apbd	Dedikasi Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan	60 Unit Usaha	800.000.000

		Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Seberang , Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara Luar Daerah						
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang telah difasilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	1,99%	3.550.000.000			1,99%	2.280.000.000
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang di Berdayakan	Kab. Kutai Kartanegara	16.968 UMKM	3.550.000.000	Apbd		1.121 UMKM	2.280.000.000
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Kab. Kutai Kartanegara	15.000 Unit Usaha	1.055.000.000	Apbd		0	-
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	120 Unit Usaha	200.000.000	Apbd		20 Unit Usaha	50.000.000

2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah MendapatkanPerizinan	Muara Kaman, Puan Cepak. Samboja, Argosari. Muara Muntai . Kota Bangun .Muara Jawa. Loa Janan. Muara Badak. Tenggarong. Kenohan. Tenggarong Seberang	1.160 Unit Usaha	720.000.000	Apbd	Dedikasi Usaha Kecil Idaman	140 Unit Usaha	500.000.000

2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1. Kelurahan Dondang, Muara Jawa 2.kelurahan tama, pole muara jawa 3. Prangat Baru, Marang Kayu 4. Jantur Baru, Muara Muntai 5. Kayu Batu, Muara Muntai 6. Sanga-Sanga Dalam, Sanga-Sanga 7. Sari Jaya, Sanga-Sanga	588 Unit Usaha	1.425.000.000	Apbd	Dedikasi Usaha Kecil Idaman	720 Unit Usaha	1.105.000.000

			8. Kab. Kutai Kartanegara 9. Luar Daerah						
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Muara Badak , Tenggarong , Kota Bangun , Muara Kaman , Samboja , Tenggarong Seberang, Muara Muntai , Loa Janan ,	100 Orang	150.000.000	Apbd	Pembentukan dan pemberdayaan Kinik K-UKM di Kecamatan	120 Orang	625.000.000

			Sebulu , Marang Kayu						
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Omzet UMKM	Kab. Kutai Kartanegara	1,10%	2.850.000.000			1,40%	2.190.000.000
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	320 Unit Usaha	2.850.000.000			320 Unit Usaha	2.190.000.000
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,Sumber Daya Manusia, SertaDesain dan Teknologi	Loa Janan , Anggana , Kenohan , Tenggarong Seberang , Muara Wis, Muara Badak , Tenggarong , Sanga-Sanga, Prov. Kalimantan	380 Unit Usaha	2.850.000.000	Apbd		320 Unit Usaha	2.190.000.000

			Timur , KAB. KUTAI KARTANEGARA , Luar Daerah						
	JUMLAH				23.646.703.059				18.251.090.432

BAB V
PENUTUP

1. Catatan Penting

   Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun berdasarkan Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Strategis Perencanaan Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan Rencana Pambangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan program dan kegiatan satu tahun kedepan dibuat secara efektif dan partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjamin keberhasilan program/kegiatan Renja PD (program tahunan) yang merupakan implementasi dari Renstra Perangkat Daerah (program 5 tahunan), maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

   1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan Rencana Kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
   2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur.
   3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara selain menjadi program/kegiatan selama tahun 2025 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk menjadi umpan balik untuk perencanaan pada tahun berikutnya.

2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

   Rencana program di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan program pemberdayaan

masyarakat serta kegiatan kerja aparatur pada periode Tahun 2025. Dalam pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara yang pelaksanaannya bersifat efisien, tepat sasaran dan berdaya guna serta pelaksanaan mendukung Indikator Kinerja Utama sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara selain menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara. RENJA PD juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara. RENJA juga berperan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Demikian gambaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahunan tahun 2025, dengan berdasarkan azas perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan, pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi untuk melaksanakan kegiatan yang akan datang guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara yang Optimal.

LAMPIRAN

CAPAIAN PROGRAM DEDIKASI BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan

(Pembangunan Koperasi yang Sehat dan Produktif Berbasis Kawasan)

Koperasi Yang tersebar di 5 Kawasan Pertanian Sektor Pertanian,Perkebunan:

NO.	KECAMATAN	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota	Ketaatan/Aktif RAT	
				Aktif	Tidak
1	MUARA KAMAN	4	139	-	4
2	SEBULU	9	759	2	7
3	TENGGARONG	2	63	-	2
4	TENGGARONG SEBERANG	5	1,001	4	1
5	LOA KULU	7	710	5	2
6	MARANGKAYU	4	22	1	3
	JUMLAH	**31**	**2,694**	**12**	**19**

Daftar Koperasi Yang tersebar di 5 Kawasan Pertanian Sektor Pertanian,Perkebunan :

NO	NAMA KOPERASI	KECAMATAN	ALAMAT/DESA
1	Tani Makmur Andalan	Muara Kaman	Sido Mukti
2	Mitra Sejahtera Abadi	Muara Kaman	Bunga Jadi
3	Karya Bangsa Mandiri	Muara Kaman	Desa Bunga Jadi
4	Sukses Sejahtera	Muara Kaman	Puan Cepak
5	Wiyata Mandala	Sebulu	Manunggal Jaya
6	Sawit Lestari Harapan Bersama	Sebulu	Sumber Sari
7	Serba Usaha Etam Sejahtera Bersama	Sebulu	Sumber Sari
8	Sama Maju Jaya	Sebulu	Segihan
9	Segihan Mitra Lestari	Sebulu	Segihan
10	Karya Etam	Sebulu	Segihan
11	Pemuda Mandiri Sejahtera	Sebulu	Tanjung Harapan
12	GUNUNG DED'EH SEJAHTERA	Sebulu	Sebulu Ilir
13	HIDUP BERSAMA	Sebulu	Serbaya
14	Karya Makmur Mandiri	Tenggarong	Bukit Biru
15	Lkm-A Gapoktan Sukodadi	Tenggarong	Mangkurawang
16	Tri Sandya Yudha	Loa Kulu	Jembayan
17	Setia Budi	Loa Kulu	Rempanga
18	Lkm-A Gapoktan Mulya Abadi	Loa Kulu	Sumber Sari
19	Mina Loa Kulu Sejahtera	Loa Kulu	Ponoragan
20	Tunas Harapan	Loa Kulu	Sungai Payang
21	Syariah Sejahtera	Loa Kulu	Jonggon
22	Sejahtera Maju Bersama	Loa Kulu	Lung Anai
23	Perikanan Cattoni Jaya Damai Sejahtera	Marang Kayu	Desa Santan Ilir
24	Sawit Tani Jaya	Marang Kayu	Desa Gunung Menangis
25	Dana Karya Mandiri	Marang Kayu	Perangat Selatan
26	Cahaya Sinar Pagi	Marang Kayu	Santan Ilir
27	Semoga Jaya	Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya
28	Galang Rejeki	Tenggarong Seberang	Bangun Rejo
29	Rukun Makmur Sejahtera	Tenggarong Seberang	Bangun Rejo
30	Bina Tani Jaya Bersama	Tenggarong Seberang	Bukit Pariaman
31	Setia Abadi	Tenggarong Seberang	Suka Maju (Dp)

Metode Pelaksanaan dalam Memfasilitasi Koperasi yang bergerak di Sektor Pertanian dalam arti luas melalui Penguatan Kelembagaan Koperasi Sektor Usaha Pertanian ;

a. Melakukan Identifikasi Rapat penyusunan Kertas Kerja Identifikasi yang paling utama berisi Aset Koperasi, Omset Koperasi, Usaha Utama Yang dijalankan, Dan apa ada Usaha-usaha lainnya dilakukan Koperasi, Apa permasalahannya dan apa yang diharapkannya dari Pembina;
b. Penyusunan Jadwal dan Identifikasi Awal Sasaran Koperasi yang akan menjadi target dalam pengisian Kertas Kerja Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
c. Mengumpulkan hasil Identifikasi dan membuat Analisasi dan rencana Tindak lanjut / Intervensi yang akan diberikan dalam Penguatan dan Penyiapan Kelembagaan Koperasi di Sektor Pertanian dalam arti luas;
d. Tindak lanjut / Intervensi yang bisa dilakukan oleh Pembina dalam mengatasi permasalan Koperasi di Sektor Pertanian dalam arti luas (dari Aspek Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Kelembagaan, Manajemen, Pelaporan Ketaatan Koperasi, Tingkat SDM Koperasi dst);
e. Intervensi lanjutan bila diperlukan membuat Kelas Pemberian Bimbingan Teknis dalam Penyusunan Laporan Neraca Keuangan, Pembuatan NIB, Pelaporan Pajak dan Akses Pasar/Penguasaan IT/Digitalisasi Koperasi;

Faktor Penghambat dan Pendorong:

1. Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan program? Minimnya Kader Muda dalam mengelola Koperasi dan masih kalangan tua, sementara tantangan Teknologi dan Informasi di era globalisasil dan masih kurangnya SDM Pembina Koperasi;
2. Apa saja faktor yang mendorong keberhasilan program Kepemimpinan yang kuat, partisipasi aktif anggota, manajemen yang efisien, dukungan eksternal, akses ke sumber daya, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan adalah kunci untuk memastikan koperasi dapat berkembang dan berfungsi secara efektif. Evaluasi berkala dan perbaikan berkelanjutan juga penting untuk menghadapi tantangan dan memaksimalkan hasil dari program;

Rekomendasi (Rencana Tindak):

Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program, memperluas manfaatnya, dan mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi:

- Pelatihan Manajemen Koperasi, Sediakan pelatihan manajerial lanjutan untuk pengurus koperasi, termasuk dalam bidang keuangan, perencanaan strategis, dan kepemimpinan (Kader Milenial) dan penambahan dan peningkatan SDM Pembina Koperasi;
- Program Peningkatan Keterampilan: pelatihan untuk anggota koperasi dalam teknik pertanian modern, teknologi baru, dan manajemen usaha untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi bersama Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian;
- Penguatan Pemanfaatan Platform Digital untuk memasarkan produk secara online, meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas, dan mempermudah transaksi
- Riset dan Pengembangan, untuk mencari solusi inovatif bagi tantangan Koperasi dan meningkatkan metode /model usaha Koperasi;
- Membangun kesadaran mengenai koperasi adalah langkah penting untuk memperkuat dan mengembangkan model bisnis ini dalam masyarakat;

USAHA KECIL IDAMAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia termasuk di Kutai Kartanegara yang merupakan mata pencarian mayoritas masyarakat, sehingga urgensi penguatan sektor UMKM menjadi penting untuk diintervensi oleh Pemerintah. Besarnya pasar tenaga kerja Indonesia dan keinginan untuk menciptakan stabilitas ekonomi harus didukung oleh iklim usaha yang lebih baik. Kualitas iklim usaha Indonesia masih perlu diperbaiki, terutama dalam hal kemudahan usaha, kebijakan di bidang Kewirausahaan, kondisi infrastruktur untuk berwirausaha, serta karakteristik pelaku usaha.

Jumlah penduduk Kutai Kartanegara yang menjadi pelaku usaha tergolong tinggi, data statistik menunjukkan hingga Juni 2024 terdapat

sejumlah 66.833 pelaku UMKM yang terdata, dan terdapat sejumlah 43.985 yang telah memiliki NIB yang tersebar di 20 Kecamatan. Namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan keinginan untuk berkembang, sehingga tingginya minat melakukan usaha tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya usaha mikro atau ultra mikro yang melakukan usaha tanpa adanya tenaga kerja (tetap dan paruh waktu) yang dibayar. Selain itu, keinginan para pelaku usaha untuk memasuki pasar global atau melakukan ekspor cenderung rendah. Untuk itu, para pelaku usaha di Kutai Kartanegara perlu dikembangkan menjadi Wirausaha.

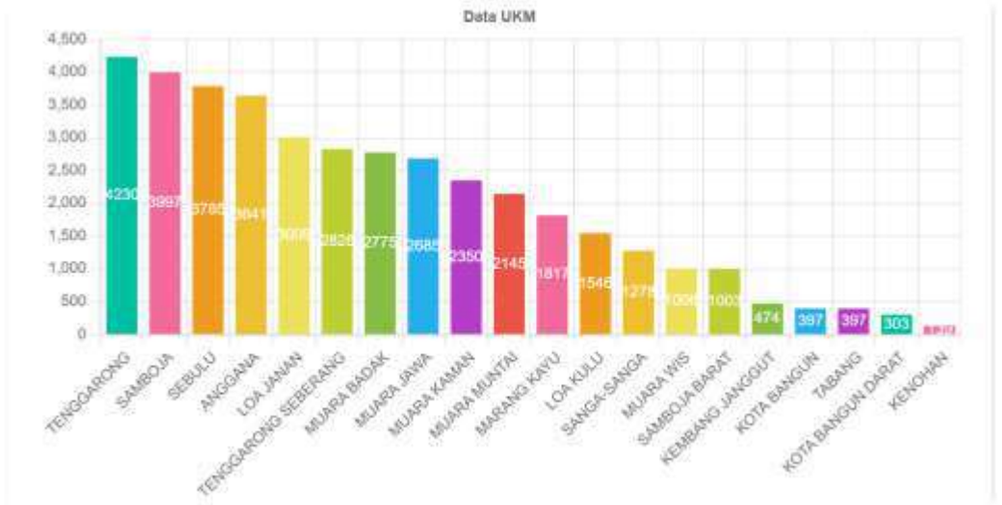

Pelaksanaan program Usaha Kecil IDAMAN dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu :

1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro,

2) Program Pengembangan UMKM.

Program pemberdayaan UMKM dilaksanakan dengan tolak ukur indikator yaitu persentase UMKM yang difasilitasi, program ini dilaksnakaan melalui kegiatan pemberdayaan usaha (pelatihan Wirausaha Baru), pelatihan kelembagaan usaha mikro, serta pengembangan usaha pada Wirausaha Baru yang dilaksanakan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mengundang masyarakat umum yang memiliki keminatan untuk berwirausaha, pelaku wirausaha baru, masyarakat yang termasuk dalam data DTKS / masyarakat miskin, masyarakat yang bergerak pada sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan mengembangkan usaha berdasarkan potensi sumber daya yang ada di wilayah masing-masing.

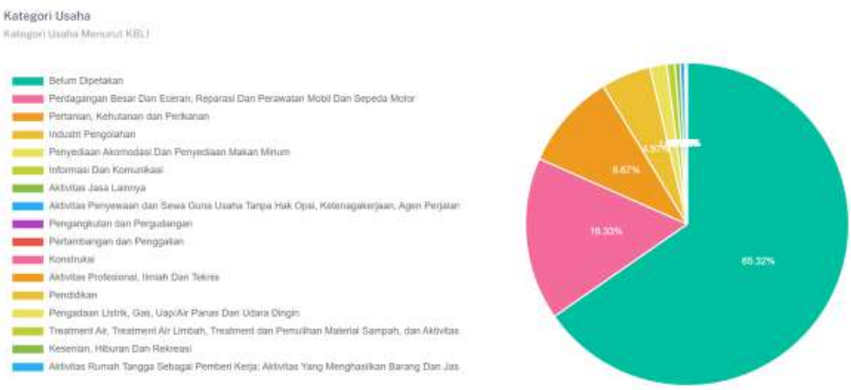

Realisai

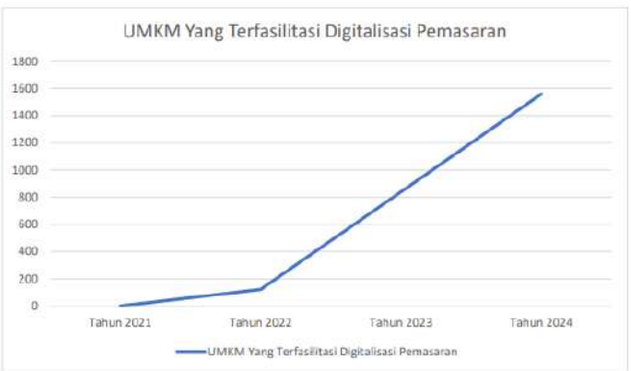

Realisasi program penyediaan dan kerjasama dengan e-commerce melalui program digitalisasi dan pemasaran berbasis online telah menyentuh hingga 1.559 pelaku UMKM melalui berbagai macam platform e-commerce

Program fasilitasi pembentukan Wirausaha Baru sejak diawali tahun 2021 hingga Juni Tahun 2024 telah bertumbuh sebesar 10.490 UMKM (dari eksisting sejumlah 56.343 menjadi 66.833 di Juni 2024

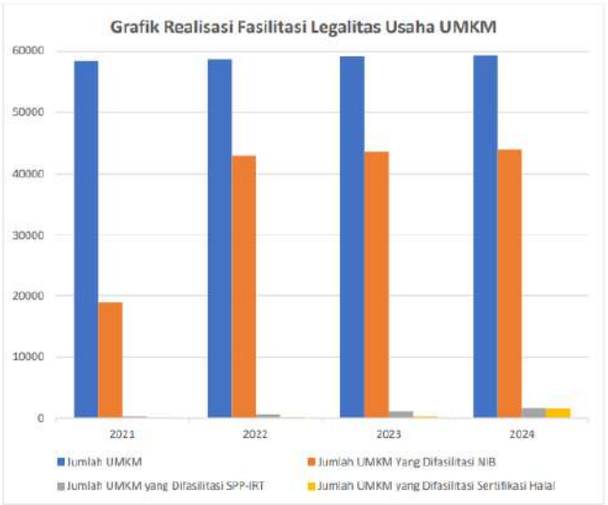

Progress realisasi program fasilitasi legalitas usaha UMKM dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak DPMPTSP Kab. Kutai Kartanegara, Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara, serta Petugas Pendamping Produk Halal yang dilaksanakan on the spot di 20 Kecamatan di Kutai Kartanegara telah tercapai sampai dengan Juni 2024 di angka 74,20% dari total seluruh UMKM sebagaimana sajian grafik diatas, dan hal ini masih terus berproses dengan harapan seluruh pelaku UMKM memiliki legalitas usaha

Program Kredit Kukar Idaman sendiri telah diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 67 Tahun 2023, dimana hingga bulan Juli Tahun 2024 ini telah tersalurkan kepada 1.204 nasabah pelaku UMKM dengan total nilai pinjaman sebesar Rp. 23.411.000.000 (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Rupiah)

Faktor penghambat dan Pendorang :

Perjalanan program dedikasi Usaha Kecil IDAMAN tentu saja memiliki berbagai tantangan dan kendala dalam perjalanannya, seperti besarnya jumlah eksisting UMKM yang ada dibanding dengan target dan realisasi tahunan yang dicapai, keterbatasan dukungan anggaran untuk menyentuk bantuan ke seluruh UMKM, masih rendahnya kesadaran pelaku UMKM untuk bangkit dan mengembangkan usahanya, serta persangan dengan produk-produk dari daerah sekitar menjadi tantangan dan kendala dalam berjalanannya program ini.

Namun terdapat pula banyak faktor pendukung dari program ini, antara lain banyaknya produk potensial yang ada di Kutai Kartanegara, sumber daya alam sebagai bahan baku lokal yang dapat dimanfaatkan, perkembangan kemajuan era digital yang memudahkan akses pemasaran, hingga meningkatnya kebutuhan beli masyarakat lokal dalam negeri yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM ini masih dapat dilihat kemajuannya melalui program dedikasi Usaha Kecil IDAMAN ini

Penutup

Setelah adanya program dedikasi Usaha Kecil IDAMAN sejak Tahun 2021 hingga Tahun 2024 ini ekspansi produk-produk dari Kutai Kartanegara ke pasar sangat pesat, bermunculan produk-produk unggulan khas dari setiap Kecamatan yang mudah dijumpai di berbagai tenant penjualan di kota, varian dan diversifikasi produk yang berbagai macam, hingga berbagai macam produk yang telah berhasil melakukan penjualan di level lokal, regional, nasional, hingga menembus pasar ekspor

bb.RENJA DINAS PARIWISATA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata agar lebih berkualitas, Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam bidang Kepariwisataan berkewajiban menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD DINAS PARIWISATA, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RENJA DINAS PARIWISATA disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara : 1) perencanaan, 2) penganggaran, 3) pelaksanaan, 4) pengawasan.

Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Dinas Pariwisata membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan mengacu kepada RENJA Dinas Pariwisata, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

B. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan RENJA Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

   Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

2. Tujuan :

   Untuk merumuskan target kinerja program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2025.

D. SITEMATIKA PENULISAN

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja DINAS PARIWISATA agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja DINAS PARIWISATA, proses penyusunan Renja DINAS PARIWISATA,

keterkaitan antara Renja DINAS PARIWISATA dengan dokumen RKDINAS PARIWISATA, Renstra DINAS PARIWISATA, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan DINAS PARIWISATA, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DINAS PARIWISATA.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja DINAS PARIWISATA.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja DINAS PARIWISATA, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB ll EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DINAS PARIWISATA Tahun Lalu dan Capaian Renstra DINAS PARIWISATA

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DINAS PARIWISATA

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DINAS PARIWISATA

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKDINAS PARIWISATA

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN dan SASARAN DINAS PARIWISATA

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DINAS PARIWISATA.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja DINAS PARIWISATA

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DINAS PARIWISATA yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DINAS PARIWISATA.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Memberikan Penjelasan mengenai :

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi :

1. Jumlah program dan kegiatan
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RENJA DINAS PARIWISATA, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan

BAB. V PENUTUP

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesai dengan kebutuhan

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

c. Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA TAHUN LALU

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PARIWISATA

Evaluasi Pelaksanaan capaian kinerja dan realisasi anggaran Renja semester II Dinas Pariwisata Tahun 2023 yang selanjutnya juga akan dikaitkan dengan pencapaian Target Renstra DINAS PARIWISATA berdasarkan realisasi Program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Capaian kinerja dan realisasi anggaran renja semester II Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 dengan hasil - hasil sebagai berikut :

1. Target kinerja yang di rencanakan dalam dokumen Renja pada tahun 2023 dapat tercapai sebesar 95.83 % sedangkan target realisasi anggaran sebesar 96,5 % (data dapat di lihat di laporan realisasi kegiatan/ E-Pantau 2023).
2. Dari dokumen laporan hasil pelaksanaan renja dapat diambil kebijakan/tindakan untuk memperkecil penghambat pelaksanaan renja, misalnya membuat susunan kegiatan prioritas untuk dilaksanakan.
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian kinerja berpengaruh pada penilaian kinerja dinas (LKjIP DINAS PARIWISATA)

Tabel TC.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DINAS PARIWISATA

Dan Pencapaian Renstra DINAS PARIWISATA s/d Tahun 2023

Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcames)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun 2024	
				Target Renja-PD Tahun 2023	Realisasi Renja-PD Triwulan IV	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
Urusan Pilihan Pariwisata								
Bidang Pariwisata								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja	(BB74)						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	5	5	100	5	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	2	2	100	2	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	5	5	100	5	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcames)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun 2024	
				Target Renja-PD Tahun 2023	Realisasi Renja-PD Triwulan IV	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1904	1632	1904	1632	85,71	1632	85,71
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	2	2	2	100	2	100
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	2	2	100	2	100
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	1	1	100	1	100
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70	53	70	53	75,71	53	75,71
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	7	5	7	140	7	140

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcames)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun 2024	
				Target Renja-PD Tahun 2023	Realisasi Renja-PD Triwulan IV	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	3	3	3	100	3	100
Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	3	4	3	75	3	75
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	1	1	100	1	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	14	14	14	100	14	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcames)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun 2024	
				Target Renja-PD Tahun 2023	Realisasi Renja-PD Triwulan IV	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	4	4	4	100	4	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	219	219	219	219	100	219	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100	1	100
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	25	20	25	20	80	20	80
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	100
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	330	330	330	330	100	330	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	289	289	289	289	100	289	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcames)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun 2024	
				Target Renja-PD Tahun 2023	Realisasi Renja-PD Triwulan IV	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	100
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	PRESEN TASI DTW YANG MEMENUHI AKSESBILITAS, AMENITAS DAN ATRAKSI	65.76%						
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4	4	4	4	100	4	4
Pengadaan/pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	18	32	18	32	177,78	18	32
Pemberdayaan Masyrakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	13	13	13	13	100	13	13
Penerapan Destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi pariwisata kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	7	7	7	7	100	7	7
Penyediaan layanan pendaftaran Usaha Pariwisata kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	2	2	2	2	100	2	2

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcames)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun 2024	
				Target Renja-PD Tahun 2023	Realisasi Renja-PD Triwulan IV	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
pembinaan dan pengawasan Usaha pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	2	2	2	2	100	2	2
Program Pemasaran Pariwisata	OKUPANSI	32,28						
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	8	8	8	8	100	8	8,00
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	20	20	20	20	100	20	20,00
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2	2	2	2	100	2	2,00
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4	4	4	4	100	4	4,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcames)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun 2024	
				Target Renja-PD Tahun 2023	Realisasi Renja-PD Triwulan IV	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pelaku Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi	6%						
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	9	9	9	9	100	9	9,00
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	7	7	7	7	100	7	7,00
Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	1	1	1	1	100	1	1,00
Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1	1	1	1	100	1	1,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcames)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun 2024	
				Target Renja-PD Tahun 2023	Realisasi Renja-PD Triwulan IV	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	PERTUMBUHAN PELAKU EKRAF	7						
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	20	20	20	20	100	20	20,00
Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	20	20	20	20	100	20	20,00
Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	40	40	40	40	100	40	40,00
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	25	29	25	29	116	25	29,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcames)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun 2024	
				Target Renja-PD Tahun 2023	Realisasi Renja-PD Triwulan IV	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	*100*	100	100	100	100	100	100,00
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	20	20	20	20	100	20	20,00

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel .TC.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan DINAS PARIWISATA

Kabupaten Kutai Kartanegara

Indikator	**SPM/ Standar Nasional**	**IKK**	**Target Renstra-PD**					**Realisasi Capaian**	**Proyeksi**		
			Tahun 2022	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nilai Sakip Perangkat daerah		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	70	72	73	74	75	80	80	80	80
Persentase DTW yang memenuhi Aksesbilitas, Amenitas dan Atraksi			23,28%	26,28%	29,28%	32,28%	35,28%	64,81	64,81	64,81	64,81
Persentase Okupansi			59,14%	61,87%	63,81%	65,76%	68,09%	62%	62%	62%	62%
Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terfasilitasi			7%	7%	7%	7%	7%	4%	4%	4%	4%
Pertumbuhan Pelaku Ekraf		Kunjungan Wisatawan	4%	4%	5%	6%	7%	7%	7%	7%	7%

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA

2.3.1. Tugas Fungsi

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

2.3.2 . Tugas

Dinas Pariwisata, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pariwisata.

2.3.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas , Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di Bidang Pariwisata;
2. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pariwisata;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pariwisata;
4. pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pariwisata;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan Capaian Kinerja Pembangunan dan juga melihat fakta permasalahan yang krusial dan tantangan yang akan datang, maka dapat digambarkan perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata :

1. Penetapan Sebagian wilayah kutai kartanegara menjadi lokasi Ibu Kota Negara
2. Belum Optimalnya pengelolaan sektor pariwisata daerah dan ekonomi kreatif
3. Digitalisasi promosi pariwisata, yang aktif dan berkesinambungan
4. Pemenuhan destinasi wisata masyarakat millenial, dan digital.
5. Wadah untuk penampilan produk kreatif
6. Peningkatan kelembagaan pariwisata,sertifikasi usaha jasa dan profesi
7. Peningkatan dan optimalisasi kelembagaan dinas

D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN RENJA DINAS PARIWISATA

Penyusunan RENJA DINAS PARIWISATA 2025 berpedoman pada RENSTRA DINAS PARIWISATA 2021-2026 dengan mempertimbangkan visi, misi dan program Kepala Daerah. Rencana Kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun juga berpedoman Kepada RENSTRA DINAS PARIWISATA 2021-2026.

Pada dasarnya yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara sudah merupakan kebutuhan dan merupakan skala prioritas untuk dilaksanakan dalam hal ini tentu untuk mendukung Dinas Pariwisata meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk itu dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel TC.31

Review Terhadap Rancangan Awal Renja DINAS PARIWISATA Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Pariwisata

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Rancangan RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan			Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
		Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi		
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	74 Nilai	19.293.043.795,00		74 Nilai	23.460.269.073,00			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen			7 Dokumen	1.350.000.000,00			
PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	50.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	50.000.000,00	Melakukan Koordinasi walidata pendukung statistik sektoral daerah oleh Perangkat Daerah

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				2 Data	600.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	600.000.000,00	1.Penyusunan Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (Nesparda) ; 2. Satu Data (BECIK) - operasional,Honorarium, Peralatan, pendampingan teknis - Pendataan Kepariwisataan - perhitungan share PDRB 17 sub sektor ekonomi kreatif
PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	50.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	50.000.000,00	Melaksanakan Forum Perangkat Daerah (Rentra dan Renja)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	350.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	3 Dokumen	450.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	100.000.000,00	Fasilitasi Rakornispar, musrenbang, forum PD, Harmonisasi kegiatan dan perencanaan 2026

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	50.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	3 Laporan	50.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	-	Koordinasi/Konsultasi, Cetak, makan Minum Rapat dalam penyusunan buku laporan.
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	150.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	2 Laporan	150.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	-	Koordinasi/Konsultasi, Cetak, makan Minum Rapat, Penyusunan Pertriwulan, Pelaporan Buku Tahunan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	17.527.386.711,00			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129 Orang/bulan	14.969.807.441,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	129 Orang/bulan	17.099.866.711,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	2.130.059.270,00	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		KAB. KUTAI KARTANEGARA,	1 Laporan	25.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	25.000.000,00	Penyusunan Laporan keuangan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	377.520.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	12 Laporan	377.520.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	-	Penyusunan Laporan keuangan
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	25.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	25.000.000,00	Penyusunan Laporan keuangan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	2 Laporan			2 Laporan	115.000.000,00			
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	25.000.000,00	Penyusunan Laporan BMD
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	50.000.000,00	Penyusunan Laporan BMD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	70.660.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	1 Laporan	30.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	- 40.660.000,00	Penyusunan Laporan BMD
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik				1 Dokumen	10.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGA	10.000.000,00	Penyusunan Laporan BMD

	Daerah SKPD						RA,		
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						20.000.000,00			
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	10.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	10.000.000,00	Pengelolaan Retribusi Daerah
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	10.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	10.000.000,00	Pengelolaan Retribusi Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	100.000.000,00			
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	50.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	1 Dokumen	50.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	-	Penyusunan Laporan Kinerja ASN
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	50.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	20 Orang	50.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	-	Pelaksanaan Bimtek SDM ASN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Layanan			5 Layanan	1.222.269.650,00			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	209.769.650,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	2 Paket	359.769.650,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	150.000.000,00	Belanja Pemeliharaan dan Modal barang
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	97.770.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	12 Paket	250.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	152.230.000,00	Belanja Makan minum

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	100.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	2 Paket	200.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	100.000.000,00	Belanja Penggandaan dan Cetak Karcis
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	200.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	40 Laporan	300.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	100.000.000,00	Perjalanan dinas dalam dan Luar Daerah
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	112.500.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	1 Dokumen	112.500.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	-	Penyusunan Dokumen kearsipan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan			12 Bulan	2.524.062.712,00			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	605.083.992,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	12 Laporan	850.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	244.916.008,00	Bayar Air, Listrik , dan internet
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.574.062.712,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	12 Laporan	1.674.062.712,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	100.000.000,00	Bayar Gaji THL
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah yang dibayarkan	12 Bulan			12 Bulan	601.550.000,00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	47 Unit	150.200.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	47 Unit	277.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	126.800.000,00	Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan

	dibayarkan Pajaknya								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	26.120.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	9 Unit	175.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	148.880.000,00	Pemeliharaan kendaraan dinas lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit	149.550.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	173 Unit	149.550.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	-	Pemeliharaan AC, Komputer, Printer
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase DTW yang Memenuhi Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi	65.76 Persen	5.080.000.000,00		65.76 Persen	17.776.894.000,00			
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata	2 Dokumen			2 Dokumen	17.419.500.000,00			
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen	600.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	2 Dokumen	550.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	- 50.000.000,00	Penyusunan dokumen perencanaan destinasi wisata
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	9 Unit	225.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	9 Unit	8.900.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	8.675.000.000,00	Pemeliharaan Destinasi Wisata
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Yang Dikelola	4 Paket			4 Paket	7.176.894.000,00			

Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	7 Unit	3.225.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	7 Unit	3.376.894.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	151.894.000,00	Pemeliharaan Destinasi Wisata
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6 Laporan	530.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	6 Laporan	2.300.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	1.770.000.000,00	Pembinaan Target 5 Desa Wisata : Desa Pela, Desa Sangkuliman, Desa Kedang Ipil, Desa Sumber Sari, Desa Kersik
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	8 Lokasi	300.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	8 Lokasi	1.500.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	1.200.000.000,00	Bantuan, DED dan PJU
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Pariwisat a yang di rekomen dasikan untuk mendap at TDUP	10 Dokumen			10 Dokumen	1.150.000.000,00			
Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	4 Usaha	100.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	4 Usaha	650.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	550.000.000,00	Memfasilitasi dan membantu melengkapi persyaratan yang disyaratkan dalam proses permohonan izin usaha pariwisata bekerjasama dengan DPMPTSP,DLHK,BAP

									ENDA,DINKES
Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	10 Dokumen	100.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	10 Dokumen	500.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	400.000.000,00	Salah satu syarat dalam pendaftaran izin usaha pariwisata di OSS
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Okupansi	32.28 Persen	1.125.000.000,00		32.28 Persen	9.850.000.000,00			
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	11 Dokumen			11 Dokumen	9.850.000.000,00			
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	15 Kegiatan	125.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	15 Kegiatan	6.500.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	6.375.000.000,00	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Dokumen	350.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	10 Dokumen	2.650.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	2.300.000.000,00	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya

Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	250.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	1 Dokumen	50.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	- 200.000.000,00	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	400.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	3 Dokumen	650.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	250.000.000,00	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Terfasilitasi	6 Persen	1.200.000.000,00		6 Persen	5.100.000.000,00			
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Yang Tersedia	3 Dokumen			3 Dokumen	1.500.000.000,00			
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	1 Unit	750.000.000,00	Sanga Sanga, Loa Kulu, Kembang Janggut, Tabang, Muara Jawa	1 Unit	1.500.000.000,00	Sanga Sanga, Loa Kulu, Kembang Janggut, Tabang, Muara Jawa	750.000.000,00	Rehab Ruang Kreatif
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3 Fasilitasi			3 Fasilitasi	3.600.000.000,00			

Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah				8 Lembaga	1.000.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	1.000.000.000,00	Menggali Potensi Ekonomi Kreatif di Kecamatan : Melaksanakan Forum Ekraf, Pengukuhan 8 Komite Ekraf di Kecamatan --->
Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah				15 Pelaku Usaha	500.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	500.000.000,00	Kegiatan ini sangat penting karena dalam rangka memfasilitasi event yang ada dikecamatan serta memfasilitasi permohonan/Proposal Komunitas Kreatif untuk melaksanakan/ mengikuti Kegiatan/Kreasi diluar Kabupaten/Kota
Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	10 Kegiatan	50.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	10 Kegiatan	100.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	50.000.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi HAKI
Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual				5 Dokumen	1.500.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	1.500.000.000,00	Pelaksanaan pekan kreatif Kukar setidaknya dilaksanakan 3 kali dalam setahun

Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah				1 Dokumen	250.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	250.000.000,00	Penyusunan dokumen strategis pengembangan ekonomi kreatif 2025-2045
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				20 Laporan	150.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	150.000.000,00	Monitoring dan evaluasi pengembangan pelaku ekonomi kreatif di 20 Kecamatan
Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	jumlah dokumen rencana aksi pengembangan Ekraf	1 Dokumen	150.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				- 150.000.000,00	
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Laporan	250.000.000,00	Tenggarong, Marang Kayu, KAB. KUTAI KARTANEGARA	1 Laporan	100.000.000,00	Tenggarong, Marang Kayu, KAB. KUTAI KARTANEGARA	- 150.000.000,00	Paket digunakan untuk memfasilitasi ekraf dalam mengakses pendanaan dan pembiayaan dari pihak lembaga pendanaan
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan Pelaku EKRAF	7 Persen	8.920.000.000,00		7 Persen	3.200.000.000,00			
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM dan Ekraf yang dilaksanakan	34 Dokumen			34 Dokumen	2.700.000.000,00			
Pengembangan Kapasitas SDM	Jumlah SDM Pariwisata	45 Orang	100.000.000,00	KAB. KUTAI	45 Orang		KAB. KUTAI		Pelatihan

Pariwisata Berbasis SKKNI	yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI			KARTANEGARA,		400.000.000,00	KARTANEGARA,	300.000.000,00	
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	20 Orang	100.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	20 Orang	100.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	-	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	100 Orang	100.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	100 Orang	1.000.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	900.000.000,00	Serifikasi Tenaga Kerja bidang pariwisata
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	24 Laporan	6.920.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,				- 6.920.000.000,00	
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	125 Orang	1.600.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	125 Orang	1.200.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	- 400.000.000,00	Pelatihan
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku EKRAF yang Dikembangkan	20 Orang			20 Orang	500.000.000,00			
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	90 Orang	100.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	90 Orang	500.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	400.000.000,00	Pelatihan

Jumlah			**35.618.043.795,00**			**59.387.163.073,00**		**23.769.119.278,00**	

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program prioritas.

Program dan kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2025 sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam memajukan Pariwisata dan ekonomi kreatif di Kutai Kartanegara diantaranya :

1. Program Kutai Kartanegara Kaya Festival (K3F)
2. Program Kukar Kreatif IDAMAN

Guna mewujudkan pengelolaan pariwisata untuk perubahan transformasi struktur ekonomi daerah, maka usulan program dan kegiatan masyarakat untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

USULAN PROGRAM KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Besaran/ Volume**	**Catatan**
2	3	4	5	6
Sertifikasi Pelaku Ekraf (Manajemen Event)	RT 11 Desa Kota Bangun III , Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Kota Bangun III	Jumlah Orang yang mengikuti Sertifikasi Pelaku Ekraf	1	Musrenbang
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (photografi, film, musik)	Dusun Selendong RT. 006, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Sabintulung	Jumlah Orang yeng mengikuti pelatihan, bimtek, dan pendampingan ekraf	1	Musrenbang
Event Olahraga Wisata, Tantangan dan Pertualangan	Blackstone Geopark Bhuana Jaya, Dusun Pulau Mas Rt 01, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Buana Jaya	Jumlah Laporan Event	1	Musrenbang

Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (photografi, film, musik)	Bangun Rejo, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Bangun Rejo	Jumlah Orang yeng mengikuti pelatihan, bimtek, dan pendampingan ekraf	1	Musrenbang
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (photografi, film, musik)	Pokdarwis Bhuana Jaya AgroEkowisata, Desa Bhuana jaya, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Buana Jaya	Jumlah Orang yeng mengikuti pelatihan, bimtek, dan pendampingan ekraf	1	Musrenbang
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (photografi, film, musik)	Desa Bangun Rejo, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Bangun Rejo	Jumlah Orang yang mengikuti pelatihan, bimtek, dan pendampingan ekraf	1	Musrenbang
Pengembangan SDM Pelaku Ekraf (kuliner/kreatifitas menu, kriya/pemanfaatan encek gondok menjadi produk khas daerah dan stage manager)	Jl. Dr. Nazir RT.03, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Kayu Batu	Jumlah SDM pelaku ekraf yang dikembangkan	1	Musrenbang

Dari usulan tersebut akan di sinergikan dengan program yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan yang tertuang dalam program sebagai berikut :

1. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
2. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
3. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
4. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Pelaksanaan program – program tersebut akan disinergikan dengan kegiatan-kegiatan dan selaku penunjang daya saing pariwisata daerah yang dilakukan oleh pelaku industri pariwisata, pelaku ekonomi kreatif, komunitas dan forum peduli pariwisata daerah serta kegiatan masyarakat lainnya.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang secara otomatis menjadi visi dan misi Kemenparekraf/ Baparekraf khususnya bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, maka ditentukan tujuan strategis (strategic goals) Kemenparekraf/Baparekraf. Tujuan ini menjadi tujuan akhir pembangunan nasional bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Tujuan Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah "Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional". Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu: 1. Nilai devisa pariwisata 2. Kontribusi Dinas Pariwisata 3. Nilai ekspor produk ekonomi kreatif. Sasarannya adalah 1. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi; 2. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi ; 3. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ; 4. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Tujuan DInas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis DINAS PARIWISATA yang dihadapi serta menjawab visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD. Tujuan yang ditetapkan dalam mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata berdasarkan Visi dan Misi sesuai dokumen RPJMD 2018 – 2023 yaitu : "Terwujudnya destinasi pariwisata Kaltim yang memiliki nilai banding/ berdaya saing" sehingga kepariwisataan Kalimantan Timur baik daya tarik wisata , SDM maupun stakeholders beserta kelembagaannya mempunyai kompetensi yang tinggi. Indikator tujuan tersebut adalah " jumlah destinasi berdaya saing" yang siap dipromosikan untuk menarik kunjungan wisatawan. Memperbaiki konektifitas antar destinasi diartikan sebagai langkah dalam upaya mewujudkan destinasi wisata Kalimantan Timur yang siap jual dengan memperbaiki komponen 3A dalam pembangunannya, yaitu

Aksesibilitas, Atraksi, dan Aminitasnya. Hal ini tidak bisa terlepas dari peranan semua stakeholder yang mempengaruhi aktifitas kepariwisataan di destinasi pariwisata dimaksud seperti masyarakat sekitar obyek wisata dan kelompok sadar wisata, peranan pemerintah daerah, para tour n' travel dan biro perjalanan, swasta dan para investor, para komunitas wisata, perhimpunan – perhimpunan wisata baik perhimpunan hotel restoran, perhimpunan organisasi angkutan darat, perhimpunan pramuwisata dan lain-lainnya. Para stakeholders ini harus terkoneksi secara baik rencana pengembangan destinasinya. Destinasi berdaya saing diatrikan sebagai strategi pengembangan destinasi yang memiliki nilai banding secara potensi dengan destinasi yang ada di Indonesia, dengan harapan Kalimantan Timur juga siap bersaing dalam hal potensi destinasi kelas dunia bagian dari Pesona Indonesia.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PARIWISATA

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Terciptanya tata Kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan pengembangan ekonomi daerah

Sasaran :

1. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan
3. Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Kreatif

Indikator Sasaran :

1. Jumlah Kunjungan Wisatawan
2. Presentase pertumbuhan Pelaku ekonomi kreatif

Strategi pembangunan dalam rangka mencapai sasaran pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan industri pariwisata berbasis potensi destinasi dan festival pariwisata yang terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan Pemerintah Desa.
2. Penguatan kemitraan antara pemerintah daerah dan komunitas kreatif, dalam penyelenggaraan pekan kreatifitas daerah

Kebijakan dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan 100 Festival (dalam 5 tahun) untuk mendorong tingkat kunjungan wisata serta geliat industri pariwisata seperti hotel, rumah makan, biro perjalanan wisata, souvenir dan homestay.
2. Memaksimalkan Penyelenggaraan Event Kreatif, 4 (empat) kali dalam setahun dilaksanakan pada wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara di Kecamatan yang berbeda dengan Tema tertentu Serta memfasilitasi penyelenggaraan berupa anggaran dan komunitas kreatif bertugas untuk memunculkan ide-ide kreatif serta konten acara, serta mengkurasi bersama konten dan produk kreatif yang akan ditampilkan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan proritas Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang direncanakan untuk dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 terdiri dari 5 (Lima) program dan 15 (Lima Belas) kegiatan dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) Sub. Kegiatan dalam rangka mensinergikan dengan RKPD DINAS PARIWISATA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel TC.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Paket	Indikator	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	74 Nilai	23.460.269.073,00			75 Nilai	23.460.269.073,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen	1.350.000.000,00			7 Dokumen	1.350.000.000,00
PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	1 Dokumen	50.000.000,00
PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	600.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	2 Data	600.000.000,00
PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	1 Berita Acara	50.000.000,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	450.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	3 Dokumen	450.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	3 Laporan	50.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	2 Laporan	150.000.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	2 Dokumen	17.527.386.711,00			2 Dokumen	17.527.386.711,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129 Orang/bulan	17.099.866.711,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	129 Orang/bulan	17.099.866.711,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	1 Laporan	25.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	377.520.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	12 Laporan	377.520.000,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	1 Dokumen	25.000.000,00

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	2 Laporan	115.000.000,00			2 Laporan	115.000.000,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	1 Dokumen	25.000.000,00
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	1 Laporan	50.000.000,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	1 Laporan	30.000.000,00
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	1 Dokumen	10.000.000,00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			20.000.000,00				20.000.000,00
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	1 Dokumen	10.000.000,00
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	1 Dokumen	10.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen	100.000.000,00			2 Dokumen	100.000.000,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	1 Dokumen	50.000.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	20 Orang	50.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat	Jumlah layanan Administrasi	5 Layanan	1.222.269.650,00			5 Layanan	1.222.269.650,00

Daerah	Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	359.769.650,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	2 Paket	359.769.650,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	250.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	12 Paket	250.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	200.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	2 Paket	200.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	300.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	40 Laporan	300.000.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	112.500.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	1 Dokumen	112.500.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	2.524.062.712,00			12 Bulan	2.524.062.712,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	850.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	12 Laporan	850.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.674.062.712,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	12 Laporan	1.674.062.712,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah yang dibayarkan	12 Bulan	601.550.000,00			12 Bulan	601.550.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	47 Unit	277.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	47 Unit	277.000.000,00

Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	175.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	9 Unit	175.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit	149.550.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	173 Unit	149.550.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase DTW yang Memenuhi Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi	65.76 Persen	17.776.894.000,00			68.09 Persen	17.776.894.000,00
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata	2 Dokumen	17.419.500.000,00			2 Dokumen	17.419.500.000,00
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen	550.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	2 Dokumen	550.000.000,00
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	9 Unit	8.900.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	9 Unit	8.900.000.000,00
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Yang Dikelola	4 Paket	7.176.894.000,00			4 Paket	7.176.894.000,00
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	7 Unit	3.376.894.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	7 Unit	3.376.894.000,00

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6 Laporan	2.300.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	6 Laporan	2.300.000.000,00
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	8 Lokasi	1.500.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	8 Lokasi	1.500.000.000,00
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Pariwisat a yang di rekomen dasikan untuk mendap at TDUP	10 Dokumen	1.150.000.000,00			10 Dokumen	1.150.000.000,00
Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	4 Usaha	650.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	4 Usaha	650.000.000,00
Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	10 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	10 Dokumen	500.000.000,00
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Okupansi	32.28 Persen	9.850.000.000,00			35.28 Persen	9.850.000.000,00
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	11 Dokumen	9.850.000.000,00			11 Dokumen	9.850.000.000,00
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	15 Kegiatan	6.500.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	15 Kegiatan	6.500.000.000,00
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media	10 Dokumen	2.650.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	10 Dokumen	2.650.000.000,00

Baik Dalam dan Luar Negeri	Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	1 Dokumen	50.000.000,00
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	650.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	3 Dokumen	650.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Terfasilitasi	6 Persen	5.100.000.000,00			7 Persen	5.100.000.000,00
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Yang Tersedia	3 Dokumen	1.500.000.000,00			3 Dokumen	1.500.000.000,00
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	1 Unit	1.500.000.000,00	Sanga sanga, loa kulu, kembang janggut, tabang, muara jawa	APBD	1 Unit	1.500.000.000,00
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3 Fasilitasi	3.600.000.000,00			3 Fasilitasi	3.600.000.000,00
Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan	8 Lembaga	1.000.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	8 Lembaga	1.000.000.000,00

	kelembagaan ekonomi kreatif daerah						
Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah	15 Pelaku Usaha	500.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	15 Pelaku Usaha	500.000.000,00
Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	10 Kegiatan	100.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	10 Kegiatan	100.000.000,00
Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	5 Dokumen	1.500.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	5 Dokumen	1.500.000.000,00
Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	1 Dokumen	250.000.000,00
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	20 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai kartanegara,	APBD	20 Laporan	150.000.000,00
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Laporan	100.000.000,00	Tenggarong, marang kayu, kab. Kutai kartanegara	APBD	1 Laporan	100.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan Pelaku EKRAF	7 Persen	3.200.000.000,00			7 Persen	3.200.000.000,00
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM dan Ekraf yang dilaksanakan	34 Dokumen	2.700.000.000,00			34 Dokumen	2.700.000.000,00
Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	45 Orang	400.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	APBD	45 Orang	400.000.000,00

Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	20 Orang	100.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	APBD	20 Orang	100.000.000,00
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	100 Orang	1.000.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	APBD	100 Orang	1.000.000.000,00
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	125 Orang	1.200.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	APBD	125 Orang	1.200.000.000,00
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku EKRAF yang Dikembangkan	20 Orang	500.000.000,00			20 Orang	500.000.000,00
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	90 Orang	500.000.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	APBD	90 Orang	500.000.000,00
Jumlah			**59.387.163.073,00**				**59.387.163.073,00**

BAB V.
PENUTUP

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini dapat disusun. Rencana Kerja (RENJA) ini dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Tahun 2025, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja 2025 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh Sumber Daya Manusia di Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good government* di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian Rencana Kerja ini disusun dengan harapan dapat dianalisis dan dipertimbangkan penuangannya dalam R-APBD Tahun Anggaran 2025 mendatang.

cc.RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya mutlak untuk dikembangkan sehubungan pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang terus berkembang sehingga perkembangan kota, kecamatan maupun kelurahan/desa harus mampu menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi masyarakat. Perkembangan tersebut harus dapat dicermati oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang nantinya akan mempunyai peranan penting dalam memajukan daerah.

Perkembangan yang diharapkan dan harus terus maju tersebut tidaklah lepas dari rencana-rencana penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh para aparatur. Oleh sebab itu maka secara berkesinambungan perencanaan yang dibuat dan disusun tidak boleh lepas dari rencana pembangunan secara nasional, propinsi maupun kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus berkembang dalam upaya pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga rencana pembangunan tersebut harus dibuat dan disusun dalam rencana kerja dari program dan kegiatan yang terukur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun oleh Pemerintah Daerah diharapkan nantinya dapat dijadikan pedoman dan arah pelaksanaan pembangunan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Melalui Rencana Kerja yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang harus dilakukan dinas selaku unsur pelaksanaan dan penyelenggaraan terhadap program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 - 2026 serta implementasinya setiap tahun sehingga evaluasi dalam pelaksanaannya.

Rencana Kerja yang telah disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian dituangkan kedalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah tersebut akan berfungsi sebagai bahan acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam membangun daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan turunan dari Rencana Strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan Rencana Kerja tersebut maka rencana kerja tahun sebelumnya akan dapat dievaluasi terhadap penyelenggaraan tujuan dan sasaran, sehingga program dan kegiatan tahun selanjutnya dapat dipahami dengan berpedoman pada Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).

Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dalam tahun berjalan harus dilakukan evaluasi terhadap pengukuran kinerja guna mengetahui sampai sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Organisasi Perangkat Daerah selaku penyusun Rencana Kerja yang selanjutnya disusun dalam bentuk laporan kinerja yang lebih dikenal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP).

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, yang meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah selaku Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2019- 2024 dengan visi “Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”. Tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap penjabaran dari Rencana Kerja 2021 - 2026 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021 sedangkan Tahun 2025 merupakan tahun keempat bagi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan Rencana Kerja yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan sehingga dapat dianggarkan dalam Rencana Anggaran dan Pendapat Belanja Daerah (RAPBD) tahun selanjutnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah selaras dengan maksud dan tujuan Rencana Strategis yaitu adanya penyediaan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berisi :

a. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
b. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
c. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun tujuan penyusunan agar dapat menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan dalam :

a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKJiP).
c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran.
d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

15.1. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran OPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Program dan Kegiatan.
BAB V PENUTUP.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun anggaran 2023 telah dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan serta mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara pendanaannya bersumber dari dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2023: Rp.48.098.053.858,00

Terbagi untuk Sepuluh (10) Program yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp28.013.504.170,00 terealisasi sebesar Rp23.075.218.292,00, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp15.260.000.000,00 terealisasi sebesar Rp6.239.824.161,00, Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan anggaran sebesar Rp3.250.000.000,00, terealisasi sebesar Rp2.025.246.509,00, . Program Pengembangan Ekspor dengan anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.085.045.580,00, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan anggaran sebesar Rp625.390.000,00, terealisasi sebesar Rp570.911.270,00, Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan anggaran sebesar Rp657.375.000,00 terealisasi sebesar Rp585.418.510,00 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dengan anggaran sebesar Rp9.460.000.000,00 terealisasi sebesar Rp6.589.144.914,00 Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan anggaran sebesar Rp187.796.000,00 terealisasi sebesar Rp127.382.000,00, Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan Anggaran Sebesar Rp.250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp176.298.448,00, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan Anggaran Sebesar Rp525.000.000,00 Terealisasi Sebesar Rp229.674.600,00.

Jumlah Realisasi Keuangan Kegiatan Tahun 2023 : Rp40.704.164.284,00 dengan persentase capaian sebesar 84.6 %, sedangkan Realisasi Fisik kegiatan sebesar 93,5 %. Pelaksanaan program / kegiatan di tahun anggaran 2023, diukur dari pencapaian terhadap sasaran yang ditetapkan.

Realisasi dan Persentase Pelaksanaan Program Kerja Perangkat Daerah

Tabel Pengukuran Kinerja Berdasarkan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.

Nama Sasaran	Nama Indikator	Satuan	Volume	Capaian Fisik
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Menengah Pengolahan Non Migas	Persen	3.50	3.71
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Persentase Sentra IKM Berbasis Hilirisasi Produk Pertanian Dalam Arti Luas Yang Aktif	Persen	100.00	50.00
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Persen	3.50	3.84
Meningkatnya kualitas layanan perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	42.52	42.52
Meningkatnya kualitas layanan perdagangan	Indeks Kepuasan Layanan Perdagangan	Persen	77.00	71.79
Meningkatnya kualitas layanan perdagangan	Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih Non Migas dan Batu Bara	Persen	2.00	447.41
Meningkatnya kualitas layanan perdagangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Metrologi	Nilai	65.00	74.77
Meningkatnya kualitas layanan perdagangan	Pertumbuhan Usaha Perdagangan yang Menggunakan e-commerce /marketplace	Persen	20.00	16.00
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100.00	100.00
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	14.00	11.00
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah	Persen	100.00	100.00

	Penandatanganan			
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100.00	100.00
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022 Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100.00	95.15
Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100.00	100.00
Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	Jumlah Inovasi	Jumlah	1.00	1.00
Pemenuhan Target Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan	Rupiah	437,000,000.00	804,422,560.00
Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00
Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100.00	100.00

Evaluasi untuk program Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan belum mencapai target yang telah direncanakan. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pagu anggaran yang direncanakan adalah sebesar Rp. 48.098.053.858,00 dan dapat terlaksana sebesar Rp. . 40.704.164.284,00 capaian kinerja terhadap program dan kegiatan tercapai 93,5%.

Adapun kendala-kendala yang mempengaruhi kurang maksimalnya pelaksanaan program tersebut adalah :

1. Masih lemahnya SDM yang ada
2. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam daerah yang ada.
3. Belum terciptanya iklim usaha yang baik di daerah

4. Adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya kelengkapan usulan berupa proposal untuk pelaksanaan kegiatan bantuan alat kepada masyarakat.

TABEL T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025

Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	85	75	Nilai 87.00	77.20 Nilai			87	1.02
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6 Dok	6 Dok			6	
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6 Dok	6 Dok	100		6	

5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 Laporan	4 Laporan	100		4	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	1 Laporan	100		1	
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	5	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	100		2	0.40
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		124 org/bln	124 org/bln	124 org/bln	100		248	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100		2	
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100		2	
11	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 unit	1 Dokumen	1 Dokumen	100		2	
I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	5	5 Dokumen	5 dok	8 dok	100		10	2.00

13	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		75	org	1	paket	1	paket	100		76	
14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		6	org	1	Dok	1	Dok	100		7	
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		15	org	15	org	15	org	100		30	
I.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	40	8	layanan	8	layanan	8	layanan	100		16	0.40
16	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12	bln	1	paket	1	paket	100		13	
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis bahan logistik Kantor yang disediakan		85	jenis	1	paket	1	paket	100	Satu paket tidak dilaksanakan karena stok opname masih banyak	86	
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2	paket	2	paket	2	paket	100		4	
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		16	jenis cetakan	2	paket	2	paket	100		18	

20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		4.5	eks	2	eks	2	eks	100		6.5	
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100	o/h	100	laporan	100	laporan	100		200	
22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		4	jenis	1	dok	1	dok	100		5	
23	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	aplikasi					100		1	
I.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4	jenis	12	bulan	12	bulan	100		16	
24	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	16	1	unit	2	unit	2	unit	100		3	
25	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1	unit truk sampah	2	unit truk sampah	2	unit truk sampah	100		3	
2660	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor		6	jenis					100		6	
27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan gedung kantor		3	jenis	6	unit	6	unit	100		9	

I.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100		24	0.40
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		750	lbr	1	laporan	1	laporan	100		751	
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4	rek/bln	1	laporan	1	laporan	100		5	
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2	laporan	2	laporan	2	laporan	100		4	
I.8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	6,800	8800	unit	8800	unit	8800	unit	100		17600	2.59
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		40	unit	40	unit	40	unit	100		80	
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		13	unit	13	unit	13	unit	100		26	
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5	unit	5	unit	5	unit	100		10	

34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		15 unit	15 unit	15 unit	100		30	
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		15 unit	15 unit	15 unit	100		30	
II	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Rekomendasi Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan	100	100 100	100	100	100		200	2.00
II.9	Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin toko swalayan	Jumlah dokumen rekomendasi ijin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan yang diterbitkan	289	60 60	60	60	100		120	0.42
35	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			61 dokumen	61 dokumen	100		61	
36	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Surat Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan per tahun	256	60 60			100		60	0.23
37	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang		18 18	29 dokumen	29 dokumen	100		47	

II.10	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang diterbitkan	21				100		0	0.00
38	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik			11 dokumen	11 dokumen	100		11	
39	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba Lanjutan dari waralaba luar negeri	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba Lanjutan dari waralaba luar negeri yang diterbitkan	15				100		0	0.00
40	Fasilitasi pemenuhan lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik luar negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri			3 dokumen	3 dokumen	100		3	#DIV/0!
II.11	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola	86	43 43			100		43	0.50
		Pertumbuhan Pendapatan Pasar (Retribusi)	19	3.33 3.33			100		3.33	0.18
		Indeks Kualitas Pasar	67	48 48			100		48	0.72
41	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola	20	6 unit	6 unit	6 unit	100		12	0.60

42	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		2 unit	8 unit	8 unit	100		10	
43	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		1 unit	1 unit	1 unit	100		2	
44	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerja (Unit Pengelola Pasar) yang memperoleh pembinaan	5	5 unit	5 unit	5 unit	100		10	2.00
45	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100		4	
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100		3	
III	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga antar waktu	4	3.72 3.72			100		3.72	0.93
		Persentase kinerja realisasi pupuk	98	97.86 97.86			100		97.86	1.00
III.12	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/	Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dijamin ketersediaannya	65	13 jenis			100		13	0.20

	Kota									
47	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100		2	
48	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100		2	
49	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100		2	
III.13	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan Barang Penting di tingkat pasar kabupaten yang terkendali harga dan stoknya	65	41.67 41.67			100		41.67	0.64

50	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan		2	
51	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100		2	
52	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100		2	
III.14	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pupuk dan Pestisida yang tersalurkan	443	80 ton	80000 ton	80 ton	100		80080	180.88
53	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan		18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	100		36	
54	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100		2	

53	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%		1	laporan	1	laporan	1	laporan	100		2	
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan ekspor produk unggulan	100	20	20	20	pelaku usaha	20	pelaku usaha	100		40	0.40
IV.15	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MoU Perdagangan Produk unggulan ekspor	5	1	mou	1	Mou	1	Mou	100		2	0.40
54	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina		15	pelaku usaha	15	pelaku usaha	15	pelaku usaha	100		30	
55	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang		6	pelaku usaha	6	pelaku usaha	6	pelaku usaha	100		12	
56	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal		8	pelaku usaha	8	pelaku usaha	8	pelaku usaha	100		16	
57	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan		3	pelaku usaha	3	pelaku usaha	3	pelaku usaha	100		6	

58	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi		10 produk	10 produk	10 produk	100		20	
59	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina		40 pelaku usaha	40 pelaku usaha	40 pelaku usaha	100		80	
V	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pertumbuhan pelaku usaha yang tertib niaga	31	26.25			100		26.25	0.85
V.16	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	95	17.99			100		17.99	0.19
60	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		1500 unit	1283 unit	1.283 unit	100		2783	
61	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		816 orang	816 orang	816 orang	100		1632	
VI	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan di toko modern	99	95.24					95.24	0.96
VI.17	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase realisasi promosi	90	50			100		50	0.56

62	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		20	UMKM	20	UMKM	20	UMKM	100		40	
63	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi		25	UMKM	25	UMKM	25	UMKM	100		50	
64	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100		2	
VII	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dokumen perencanaan dan unit sentra pengembangan industri	8	2	Dokumen							2	0.25
VII.18	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan jumlah sentra	3	1	sentra					100		1	0.33
65	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100		2	
66	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100		2	

67	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100		2	
68	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100		2	
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Cakupan pemberian rekomendasi izin usaha industri	100						0	0.00
VIII.19	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah	98,25	79.04 79.04			100		79.04	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah		0.02 0.02			100		0.02	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di wilayah Kabupaten		0.02 0.02			100		0.02	
69	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100		2	

	Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS								
70	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100		2	
IX	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang dalam SIINAS	24,95	2.9 2.9					2.9	
IX.20	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mendapatkan informasi industri secara lengkap dan terkini	221	33 unit usaha			100		33	0.15
71	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100		2	

	Nasional (SIINas)									
72	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas		1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100		2	
73	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100		2	

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu merumuskan kebijakan teknis bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara selalu proaktif dan kreatif dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai inovator dan motivator.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai dinas teknis yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 juga diberi tanggung jawab sebagai salah satu dinas penghasil dalam upaya mencari dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indikator yang digunakan untuk mengukur dukungan kinerja layanan publik adalah :

1. Penyelesaian masalah pengaduan konsumen
2. Pertumbuhan omzet industri kecil rumah tangga berbasis komoditas pertanian
3. Pertumbuhan omzet IKM berbasis komoditas pertanian , dan
4. Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi.

Sedangkan dalam pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan melaksanakan pelayanan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

TABEL TC 30

Tabel T-. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Kutai Kartanegara

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecl dan Menengah		Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Menengah Pengolahan Non Migas	2.3	3.5	3.7	4.1	2.3	3.71	3.7	4.1	4.1	4.8	
			Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan Non migas	2.4	3.5	3.8	4.3	2.4	3.84	3.8	4.3	4.3	4.7	
			Persentase Sentra IKM berbasis Hilirisasi produk pertanian dalam arti luas yang aktif	100	100	100	100	100	50	100	100	100	100	
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Perdagangan		Pertumbuhan nilai ekspor bersih non migas dan batu bara (nilai ekspor dikurangi nilai impor)	2	2	2	2	2	447.41	2	2	2	2	

			Pertumbuhan usaha perdagangan yang menggunakan e- commerce/ marketplace	20	20	20	20	20	16.00	20	20	20	20	
			Indeks Kualitas Layanan Perdagangan (Pasar)Prasarana Pengembangan Wilayah (%)	75	77	82	87	75	71.79	82	87	87	92	
			Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Ijin Sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	30.28	42.52	55.84	69.87	30.28	42.52	55.84	69.87	69.87	84.25	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan metrologi	NA	65	75	80	65	74.77	75	80	80	85	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

A. Permasalahan dan Solusi di Bidang Industri

Pembangunan Industri terutama industri kecil dan menengah dalam pembangunan struktur ekonomi negara-negara sedang berkembang sangat penting dan hal ini telah dibuktikan bahwa peranan industri kecil menengah mampu menjadi tiang penggerak perekonomian akibat badai krisis yang menimpa negeri ini. Barangkali yang perlu menjadi catatan dan perhatian semua pihak adalah daya tahan beberapa industri unggulan yang menjadi tiang penyangga ekonomi mengalami kemunduran akibat ketidak mapuan menghadapi persaingan yang semakin tinggi dalam pasar global. Oleh karenanya upaya pembinaan dan pengembangan terhadap industri terus dilakukan. Pemberdayaan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengembang misi bagi pembinaan dan pengembangan industri dari tahun ke tahun telah mampu memberikan nilai tambah positif terhadap pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan melalui upaya-upaya peningkatan usaha industri, sehingga dampaknya tentu berujung pada efek pengganda yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan pengusaha/pengrajin khususnya dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara umumnya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dengan berbagai kegiatan yang di dukung oleh berbeagai program telah dioptimalkan, namun dengan adanya berbagai faktor pembatas maka dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri masih terdapat beberapa permasalahan, sehingga pembiaan dan pengembangan industri tersebut belum bisa mencapai sasaran yang optimal, antara lain disebakan oleh :

1. Tidak tentunya lokasi kegiatan pameran atau acara Dekranasda lainnya sedangkan didalam RKA sudah tercantum lokasi tetapi event/kegiatan Dekranasda dilakukan di Provinsi lainnya.

2. Masih banyak produk IKM yang belum bisa memasarkan usahanya masuk ke toko modern/supermarket
3. Banyak aturan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dengan pihak toko modern agar produk mereka bisa dipasarkan
4. Mahalnya biaya sewa tempat untuk outlet di Bandara APT. Pranoto Samarinda mengakibatkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan
5. Banyaknya kegiatan pameran dengan membawa pelaku usaha dan kita harus mendahulukan dananya sangat sulit untuk dilaksanakan
6. Belum keluarnya dana kita mengikuti event pameran memakai dana belum terealisasi sudah dituntut lagi untuk melaksanakan event pameran Masih banyaknya IKM yang belum paham tentang bahaya menggunakan bahan tambahan berbahaya
7. Masih banyak IKM yang belum memiliki ijin atau sertifikasi
8. SPD kegiatan belum terbit/keluar

Upaya Yang Dilakukan (Solusi) Dalam rangka pengembangan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (PIKM) di Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan solusi yang terkait berbagai kegiatan yang ditunjang dari dana APBD (Desentralisasi), antara lain :

1. Di dalam RKA untuk kegiatan promosi tidak mencantumkan lokasi pameran sehingga apabila ada event/kegiatan di lokasi yang lain bisa kita ikuti.
2. Dilakukannya pertemuan atau koordinasi antara pelaku usaha dengan toko modern/supermarket
3. Mengurangi persyaratan dan masalah pembayaran produk IKM yang sudah laku terjual bisa dibayarkan dengan cepat karena mereka perlu modal untuk melanjutkan usahanya
4. Diupayakan untuk sewa tempat Outlet bandara APT. Pranoto bisa di jangkau sehingga pelaku usaha bisa memasarkan produknya.

5. Perlunya dana talangan untuk mengikuti event pameran sehingga kita bisa mempromosikan produk unggulan Kab Kukar.
6. Dilakukannya pembinaan dan sosialisasi tentang bahaya penggunaan bahan tambahan makanan berbahaya
7. Dilakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha (IKM)
8. Agar kegiatan berjalan dengan lancar maka diperlukan koordinasi dan SPD dapat terbit sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
9. Agar kegiatan berjalan dengan lancar maka diperlukan koordinasi dan SPD dapat terbit sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

B. Permasalahan dan Solusi di Bidang Perdagangan

Permasalahan

1. Lokasi pasar tradisional yang berjauhan
2. Tingkat kesadaran pemilik alat yang masih kurang untuk membawa alatnya untuk ditera/tera ulang
3. Kurang lengkapnya alat uji standar yang dimiliki UPT Meterologi Legal
4. Tingkat kesadaran pemilik alat yang masih kurang untuk membawa alatnya untuk ditera/tera ulang
5. Susahnya bekerjasama dengan distributor untuk memfasilitasi barang untuk kegiatan operasi pasar tersebut
6. Lokasi tempat pelaksanaan operasi pasar yang jarak tempuhnya jauh dan pelaksanaannya yang harus ke Desa-Desa
7. Lambatnya tanggapan dari pihak Kecamatan tentang penunjukan Tim Monitoring Kecamatan
8. Instansi terkait yang memiliki data kurang kooperatif dalam memberikan data
9. Transport untuk pengangkutan material cukup mahal dan cuaca tidak menentu
10. Adanya penolakan dari masyarakat desa terhadap lokasi yang dijadikan tempat dibangunnya pasar ternyata lahan tersebut diperuntukkan untuk oembangunan masjid
11. Aktifitas pegadang mingguan dan cuaca yang tidak menentu

12. Adanya penolakan dari para pedagang yang berada di luar area pasar gerbang raja
13. Adanya aktivitas pasar setiap hari dan cuaca yang tidak menentu.
14. Kurang tersedianya SDM Pengelola Administrasi kegiatan yang memiliki kompetensi :
    a. Administrasi Keuangan Daerah
    b. Tenaga Penganalisa
15. Jumlah komoditi jagung yang diminta oleh calon mitra usaha sangat banyak dan harga yang diminta pengepul tidak sesuai (harga rendah), sehingga belum ada kesepakatan antara petani jagung dengan calon mitra usaha.
16. Menunggu selesainya pembuatan aplikasi oleh pihak ketiga
17. Menunggu proses anggaran perubahan dilakukan baru bisa dilaksanakan kegiatan

Solusi

1. Perlu diadakan sosialisasi tentang tera dan tera ulang alat UTTP agar pemilik alat menyadari pentingnya untuk menera alat mereka sesuai dengan akurasi setiap alat ukur sehingga antara penjual dan pembeli tidak ada yang merasa dirugikan
2. Perlu diadakan sosialisasi tentang tera dan tera ulang alat UTTP agar pemilik alat menyadari pentingnya untuk menera alat mereka sesuai dengan akurasi setiap alat ukur sehingga antara penjual dan pembeli tidak ada yang merasa dirugikan
3. Perlunya pemahaman dan pengertian dari agen-agen atau distributor untuk bekerjasama dalam kegiatan operasi pasar barang kebutuhan pokok - Adanya kepastian tentang penyediaan dana dari kegiatan tersebut
4. Melalui koordinasi baik surat menyurat atau ke lapangan, instansi atau perusahaan terkait
5. Mencari trasnport yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan

6. Kepala desa harus menyediakan lahan untuk pembangunan pasar yang sudah memiliki legalitas dan diperuntukkannya harus jelas untuk pembangunan pasar
7. Lokasi pembangunan pasar bebas dari aktifitas perdagangan
8. Dibuatkannya pintu masuk dan keluar diarea pafar
9. Lokasi pasar harus bersih dari aktifitas pasar dan dipagar , dan untuk sementara pedagang direlokasi di tempat lain
10. Kegiatan diusulkan di hapus
11. Bertambahnya SDM/tenaga kerja
    a. Administrasi Keuangan Daerah
    b. Tenaga Penganalisa
12. Peningkatan produksi jagung
13. Peningkatan kualitas jagung.
14. Terus dilakukan fasilitasi komunikasi kemitraan.
15. Dilaksanakan sesuai SPK kontrak pihak ketiga.
16. Dilaksanakan secara terus menerus agar target tetap tercapai

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Berikut ini beberapa hal penting dari rancangan awal RKPD yang menjadi landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan Misi 2 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten dan Misi 4 yaitu Meningkatkan Pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah yang ada di RPJMD Kab. Kutai Kartanegara 2016-2021 dengan tujuan sebagai berikut :

1. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi
3. Meningkatkan pemberdayaan industri kecil dan perdagangan
4. Meingkatnya pengembangan kawasan strategis
5. Meningkatkan motivasi dan etos masyarakat berwirausaha, penciptaan peluang kerja, pelatihan ketrampilan, serta perlindungan dan pengawasan tenaga kerja

Program Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara

1. Tata kelola pemerintahan yang empatik
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
5. Pengentasan Kemiskinan
6. Pertanian dalam arti luas
7. Industri Kecil dan koperasi
8. Perdagangan dan pasar tradisional
9. Pariwisata Lingkungan hidup
10. Infrastruktur penataan ruang dan permukiman

Dari Program Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan program prioritas dari misi ke 2 dan 4 sebagi berikut :

a. Industri Kecil;
b. Perdagangan; dan
c. Pengelolaan pasar.

Tabel TC. 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
						23.280.034.769						36.513.886.792	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,00	Nilai	23.280.034.769	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,00	Nilai	36.513.886.792	
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana,anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6	Dokumen	575.123.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana,anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6	Dokumen	1.250.000.000	
3.31.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kepmen 050 5889	0	dokumen	-	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kepmen 050 5889	1	dokumen	50.000.000	

3.31.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	data	-	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3	data	500.000.000		
3.31.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah BerdasarkanN Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	Berita acara	-	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah BerdasarkanN Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	berita acara	50.000.000		
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dokumen	267.623.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dokumen	450.000.000		
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	laporan	157.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	laporan	50.000.000		

3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	laporan	150.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	laporan	150.000.000		
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	1	Laporan	13.863.027.507	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	1	Laporan	15.363.240.339		
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124	orang/bln	13.697.903.907	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124	orang/bln	14.877.516.739		
3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	25.000.000		
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	laporan	165.123.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	laporan	435.723.600		

3.31.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kepmen 050 5889	0	dokumen	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kepmen 050 5889	1	dokumen	25.000.000		
3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah		Jumlah dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1	Dokumen	135.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah		Jumlah dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1	Dokumen	150.000.000		
3.31.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	135.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	50.000.000		
3.31.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kepmen 050 5889	0	laporan	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kepmen 050 5889	1	laporan	100.000.000		
3.31.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2	dokumen	-	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2	dokumen	20.000.000		
3.31.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	0	laporan	-	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	laporan	10.000.000		
3.31.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	dokumen	-	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	dokumen	10.000.000		

3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	1	Dokumen	337.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	1	Dokumen	423.000.000		
3.31.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	200.000.000	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	200.000.000		
3.31.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11	orang	67.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11	orang	153.000.000		
3.31.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	orang	70.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	orang	70.000.000		
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	8	Layanan	1.524.625.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	8	Layanan	2.857.613.000		
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	75.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	75.000.000		

3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	140.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	1.070.113.000	Peralatan kantor penunjang aplikasi SRIKANDI, kearsipan dan penatausahaan Keuangan serta administrasi 10 unit, Scanner 3 unit, Printer 3 unit, Layar Interakitf 3 unit,Laptop 2 unit	
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	paket	237.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	paket	150.000.000		
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	75.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	75.000.000		
3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	dokumen	10.125.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	dokumen	75.000.000		
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	laporan	800.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	laporan	650.000.000		

3.31.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	dokumen	112.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	dokumen	262.500.000	Untuk Record center (perlu pembenahan untuk peningkatan penilaian arsip)	
3.31.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	dokumen	75.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	dokumen	500.000.000	Team Creator untuk mendesain pemasaran dan promosi, kemudian diperlukan untuk pengembangan medsos (IG dan FB) dan website SIHABOK yang akan kami hidupkan kembali dalam rangka pelaksanaan promosi pemasaran	
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	Jenis Pengadaan	730.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	Jenis Pengadaan	2.180.750.000		
3.31.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	unit	1.260.000.000	pembelian 4 unit kendaraan dinas untuk kepala bidang yang sdh pembelian dari thn 2010 yang lalu	

3.31.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit Truk Sampah;	550.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit Truk Sampah;	630.750.000	Penambahan pagu ditambahkan dari sub kegiatan lain,dalam rangka penyesuaian belanja dengan nilai pagu pada e-katalog	
3.31.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	unit	-	Pengadaan Mebel	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	unit	200.000.000		
3.31.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	unit	90.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	unit	-		
3.31.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	unit	90.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	unit	90.000.000		
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	12	Bulan	4.895.209.052	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	12	Bulan	12.299.733.743		

3.31.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	2.024.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	2.024.000		
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	650.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	3.063.308.450		
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	laporan	4.243.185.052	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	laporan	9.234.401.293	Penambahan pagu pemenuhan tenaga kebersihan Outsourcing pasar Mangkurawang dan Tangga Arung/Lapangan Pemuda 4.080.474.612, Penyediaan jasa keamanan pasar Pasar Mangkurawang dan Tangga Arung 2.910.823.255, Jasa pengelolaan parkir pasar 100.000.000	
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Jumlah barang milik daerah	1450	unit	1.119.549.710	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Jumlah barang milik daerah	1450	unit	1.969.549.710		

	Daerah						Daerah							
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40	unit	141.233.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40	unit	141.233.100		
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	unit	378.316.610	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	unit	378.316.610		

3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	500.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	1.250.000.000	Rehab Gedung Kantor Perindustrian dan Perdagangan Jln. Imam Bonjol 500.000.000,00 , Pembangunan outlet IKM dan sekretariat Dekranasda 200.000.000,00 , Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor/Kantor Pengelola, 200.000.000,00 , Rehab ruangan kerja 350.000.000,00	
3.31.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	unit	100.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	unit	100.000.000		
3.31.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	unit	100.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	unit	100.000.000		

3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Cakupan Rekomendasi Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan	100	Persen	370.000.000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Cakupan Rekomendasi Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan	100	Persen	205.000.000		
3 30 02 2.01	Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin toko swalayan		Jumlah dokumen rekomendasi ijin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan yang diterbitkan	76	dokumen	85.000.000	Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin toko swalayan		Jumlah dokumen rekomendasi ijin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan yang diterbitkan	76	dokumen	85.000.000		
3 30 02 2.01 01	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab Kukar	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	dokumen	85.000.000	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab Kukar	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	dokumen	85.000.000		
3 30 02 2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Surat Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan per tahun	64	Surat TDG	100.000.000	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Surat Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan per tahun	64	Surat TDG	35.000.000		

3 30 02 2.02 01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	18 Kec	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1	dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	18 Kec	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1	dokumen	35.000.000	Perencanaan Pembangunan Kawasan pergudangan untuk mengatasi inflasi pada zona hulu.	
3 30 02 2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri		Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang diterbitkan	15	dokumen	85.000.000	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri		Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang diterbitkan	15	dokumen	85.000.000		
3 30 02 2.03 01	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri terintegrasi secara elektronik		Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	1	dokumen	85.000.000	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri terintegrasi secara elektronik		Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	1	dokumen	85.000.000		
3 30 02 2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba Lanjutan dari waralaba luar negeri		Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba Lanjutan dari waralaba luar negeri yang diterbitkan	4	dokumen	100.000.000	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba Lanjutan dari waralaba luar negeri		Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba Lanjutan dari waralaba luar negeri yang diterbitkan	4	dokumen	-		

3 30 02 2.04 01	Fasilitasi pemenuhan lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik luar negeri		Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	1	dokumen	100.000.000	Fasilitasi pemenuhan lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik luar negeri		Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	1	dokumen	-		
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola	75,00	persen	6.680.000.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola	75,00	persen	17.155.000.000		
			Pertumbuhan Pendapatan Pasar (Retribusi)	4,22	persen				Pertumbuhan Pendapatan Pasar (Retribusi)	4,22	persen			
			Indeks Kualitas Pasar	62,00	nilai				Indeks Kualitas Pasar	62,00	nilai			
3 30 03 2,01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola	4,00	unit	6.255.000.000	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola	4,00	unit	16.555.000.000		

3 30 03 2,01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Desa Separi Kec Tenggarong Seberang , Pasar Desa Kota Bangun Ulu Kec.Kota Bangun, Pasar Desa Segihan Kecamatan Sebulu, Pasar Desa Perangat Baru Kecamatan Marang Kayu, Pasar Desa Rantau Hempang Kecamatan Muara Kaman, Pasar Desa Badak Baru	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	7	unit	6.055.000.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Desa Separi Kec Tenggarong Seberang , Pasar Desa Kota Bangun Ulu Kec.Kota Bangun, Pasar Desa Segihan Kecamatan Sebulu, Pasar Desa Perangat Baru Kecamatan Marang Kayu, Pasar Desa Rantau Hempang Kecamatan Muara Kaman, Pasar Desa Badak Baru	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	7	unit	14.355.000.000	Revitalisasi pasar mangkurawang 2 dalam rangka percepatan operasional pasar	

		Kecamatan Muara badak, Revitalisasi Pasar Mangkurawang						Kecamatan Muara badak, Revitalisasi Pasar Mangkurawang						
3 30 03 2,01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Gerbang Raja (Mangkurawang)	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1	unit	200.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Gerbang Raja (Mangkurawang)	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1	unit	2.200.000.000		
3 30 03 2,02	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerja (Unit Pengelola Pasar) yang memperoleh pembinaan	5,00	unit UPP	425.000.000	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerja (Unit Pengelola Pasar) yang memperoleh pembinaan	5,00	unit UPP	600.000.000		

3 30 03 2,02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Wonotirto Kec. Samboja, Pasar Mangkurawang Kec. Tenggarong.	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2	dokumen	275.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Wonotirto Kec. Samboja, Pasar Mangkurawang Kec. Tenggarong.	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2	dokumen	600.000.000		
3 30 03 2,02 02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Wonotirto Kec. Samboja, Pasar Mangkurawang Kec. Tenggarong.	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	dokumen	150.000.000	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Wonotirto Kec. Samboja, Pasar Mangkurawang Kec. Tenggarong.	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	dokumen	-		
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Koefisien variasi harga antar waktu	3,57	Persen	1.355.000.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Koefisien variasi harga antar waktu	3,57	Persen	2.595.000.000		
			Persentase pupuk bersubsidi yang diawasi	98,39	Persen				Persentase pupuk bersubsidi yang diawasi	98,39	Persen			
3 30 04 2,01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dijamin ketersediaannya	13	Jenis	405.000.000	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dijamin ketersediaannya	13	Jenis	300.000.000		

3 30 04 2,01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1	laporan	135.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1	laporan	100.000.000		
3 30 04 2,01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1	laporan	135.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1	laporan	100.000.000		
3 30 04 2,01 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1	laporan	135.000.000	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1	laporan	100.000.000		

3 30 04 2,02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah barang kebutuhan pokok dan Barang Penting di tingkat pasar kabupaten yang terkendali harga dan stoknya	66,67	Persen	545.000.000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah barang kebutuhan pokok dan Barang Penting di tingkat pasar kabupaten yang terkendali harga dan stoknya	66,67	Persen	2.075.000.000		
3 30 04 2,02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	laporan	135.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	laporan	250.000.000		
3 30 04 2,02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1	laporan	135.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1	laporan	50.000.000		

3 30 04 2,02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	20 Kec	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	laporan	275.000.000	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	20 Kec	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	laporan	1.775.000.000	Penambahan pagu pelaksanaan Operasi Pasar Barang Kebutuhan Pokok dalam rangka pencapaian target pelaksanaan di 20 Kecamatan.	
3 30 04 2,03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pupuk dan Pestisida yang tersalurkan	86.819	Ton	405.000.000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pupuk dan Pestisida yang tersalurkan	86.819	Ton	220.000.000		
3 30 04 2,03 01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1	dokumen	135.000.000	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1	dokumen	50.000.000		
3 30 04 2,03 02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1	laporan	135.000.000	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1	laporan	35.000.000		
3 30 04 2,03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1	laporan	135.000.000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1	laporan	135.000.000		

3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase pertumbuhan ekspor produk unggulan	100,00	Persen	1.510.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase pertumbuhan ekspor produk unggulan	100,00	Persen	1.420.000.000		
3 30 05 2,01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah MoU Perdagangan Produk unggulan ekspor	1	MoU	1.510.000.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah MoU Perdagangan Produk unggulan ekspor	1	MoU	1.420.000.000		
3 30 05 2,01 01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kec. Marang Kayu, Kec. Muara badak, Kembang Janggut, Muara Kaman	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	40	Pelaku Usaha	-	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kec. Marang Kayu, Kec. Muara badak, Kembang Janggut, Muara Kaman	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	40	Pelaku Usaha	-		
3 30 05 2,01 02	Pameran Dagang Nasional	Jakarta	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	7	Pelaku Usaha	485.000.000	Pameran Dagang Nasional	Jakarta	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	7	Pelaku Usaha	775.000.000	Hasil mapping penyesuaian nomenklatur baru	
3 30 05 2,01 03	Pameran Dagang Lokal	Kec. Tenggarong, Kec. Sanga-Sanga, Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	10	Pelaku Usaha	235.000.000	Pameran Dagang Lokal	Kec. Tenggarong, Kec. Sanga-Sanga, Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	10	Pelaku Usaha	235.000.000		

		Samboja, Kota Muara Badak						Samboja, Kota Muara Badak						
3 30 05 2,01 04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Surabaya, Yogyakarta, Banjarmasin dan Makasar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5	Pelaku Usaha	460.000.000	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Surabaya, Yogyakarta, Banjarmasin dan Makasar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5	Pelaku Usaha	235.000.000		
3 30 05 2,01 05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Kukar	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	6	Produk	330.000.000	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Kukar	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	6	Produk	175.000.000	Hasil mapping penyesuaian nomenklatur baru	
3 30 05 2,01 06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kab Kukar	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	4	Pelaku Usaha	-	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kab Kukar	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	4	Pelaku Usaha	-	Drop kegiatan hasil mapping	
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Pertumbuhan pelaku usaha yang tertib niaga	30,00	Persen	485.000.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Pertumbuhan pelaku usaha yang tertib niaga	30,00	Persen	985.000.000		
3 30 06 2,01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	19,41	Persen	485.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	19,41	Persen	985.000.000		

3 30 06 2,01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	18 Kecamatan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1.750	unit	310.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	18 Kecamatan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1.750	unit	810.000.000	Pembelian peralatan tera tera ulang alat UTTP dalam rangka peningkatan pelaksanaan tera tera ulang alat UTTP.	
3 30 06 2,01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	18 Kecamatan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1000	orang	175.000.000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	18 Kecamatan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1000	orang	175.000.000		
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan di toko modern	98,81	persen	610.000.000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan di toko modern	98,81	persen	685.000.000		
3 30 07 2,01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase realisasi promosi	80	persen	610.000.000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase realisasi promosi	80	persen	685.000.000		
3 30 07 2,01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	15	UMKM	175.000.000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	15	UMKM	250.000.000		

3 30 07 2,01 02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	50	UMKM	435.000.000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	50	UMKM	435.000.000	Penambahan pagu hasil mapping nomenklatur baru	
3 30 07 2,01 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kaltim	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1	dokumen	-	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kaltim	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1	dokumen	-		
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Dokumen perencanaan dan unit sentra pengembangan industri	1,00	dokumen	20.110.000.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Dokumen perencanaan dan unit sentra pengembangan industri	1,00	dokumen	26.865.000.000		
3 31 02 2,01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen perencanaan dan jumlah sentra	1,00	Sentra IKM	20.110.000.000	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen perencanaan dan jumlah sentra	1,00	Sentra IKM	26.865.000.000		
3 31 02 2,01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	dokumen	600.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	dokumen	600.000.000		

3 31 02 2,01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	dokumen	18.245.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	dokumen	25.000.000.000	Penambahan pagu dalam rangka pencapaian program dedikasi pembangunan sentra IKM Pakan Ikan serta pembelian peralatan sentra IKM.	
3 31 02 2,01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2	dokumen	1.065.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2	dokumen	1.065.000.000		
3 31 02 2,01 06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	dokumen	200.000.000	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	dokumen	200.000.000		
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Cakupan pemberian rekomendasi izin usaha industri	100	Persen	-	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Cakupan pemberian rekomendasi izin usaha industri	100	Persen	-		
3 31 03 2,01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah	88,65	Persen	-	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah	88,65	Persen	-		

	Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah	0,06	Persen		Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah	0,06	Persen			
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di wilayah Kabupaten	0,06	Persen				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di wilayah Kabupaten	0,06	Persen			
3 31 03 2,01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang	1	dokumen	-	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang	1	dokumen	-	Drop kegiatan hasil mapping	

	Berusaha		Terintegrasi dengan Sistem OSS				Berusaha		Terintegrasi dengan Sistem OSS					
3 31 03 2,01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kec. Tenggarong, Kec. Tenggarong seberang, Kec. Kembang janggut, Kec. Muara Jawa, Kec. Loa Janan dan Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1	dokumen	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kec. Tenggarong, Kec. Tenggarong seberang, Kec. Kembang janggut, Kec. Muara Jawa, Kec. Loa Janan dan Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1	dokumen	-	Drop kegiatan hasil mapping	

3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase IKM yang dalam SIINAS	5,80	Persen	975.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase IKM yang dalam SIINAS	5,80	Persen	790.000.000		
3 31 04 2,01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang mendapatkan informasi industri secara lengkap dan terkini	50	IKM	975.000.000	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang mendapatkan informasi industri secara lengkap dan terkini	50	IKM	790.000.000		
3 31 04 2,01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	dokumen	600.000.000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	dokumen	415.000.000		
3 31 04 2,01 02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota	1	dokumen	-	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota	1	dokumen	-	Drop kegiatan hasil mapping	

	Kabupaten/Kota melalui SIINas		Melalui SIINas				Kabupaten/Kota melalui SIINas		Melalui SIINas					
3 31 04 2,01 03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1	dokumen	375.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1	dokumen	375.000.000		
						55.375.034.769						87.213.886.792		

2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam bagian ini di uraikan hasil telaah terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat, assosiasi, SKPD Kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan dan Kabupaten

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		
	- Pembangunan Pasar	Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Tabang, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Sebulu dan Kecamatan Marang Kayu	Jumlah pasar yang dibangun	10 unit	
	- Revitalisasi pasar	Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan sebulu	Jumlah pasar yang di revitalisasi	2 unit	
2.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				
	- Fasilitasi Pelatihan Olahan Pangan dan	Kecamatan Tenggarong, Kecamatan	Jumlah IKM yang di latih dan difasilitasi	6 IKM	

	Sertifikasi Halal bagi IKM	Loa Janan, Kecanmatan Kota Bangun dan Kecamatan Marang Kayu	Halal		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah dan prioritas pembangunan nasional merupakan hal yang sangat penting dalam menyusun target dengan memperhatikan program nasional, propinsi dan kabupaten. Rencana kerja memuat visi, misi,tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara yang disusun sesuai tugas dan fungsi guna mewujudkan tujuan dan sasaran kerja yang telah ditetapkan.

1.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 telah ditetapkan tujuan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Meningkatnya Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah
2. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah.
3. Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif.
4. Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah.

B. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai antara lain :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah.
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Perdagangan.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Tabel 3.1.

Target Indikator Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN Meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan.		LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) kategori industri pengolahan	%	6,97
Meningkatkan akses dan tata kelola perdagangan besar dan eceran		LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) kategori perdagangan besar dan eceran	%	4,50
	SASARAN 1. Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Menengah Pengolahan Non Migas	%	4,80
		Pertumbuhan pelaku usaha sektor industri pengolahan non migas	%	4,70
		Persentase sentra IKM berbasis hilirisasi produk pertanian dalam arti luas yang aktif	%	100
	2. Meningkatnya layanan perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor bersih non migas dan batu bara (nilai ekspor dikurangi nilai nilai impor)	%	2
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	84,25
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan metrologi	Nilai	85
		Indeks kualitas layanan perdagangan (pasar)	Nilai	92
		Pertumbuhan usaha perdagangan yang menggunakan e-commerce/marketplace	%	20

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan dapat di lihat pada tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025.

Tabel 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80,00	Nilai	36.513.886.792			78,00	Nilai	23.884.610.769
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana,anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		6	Dokumen	1.250.000.000			6	Dokumen	575.123.500
3.31.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kepmen 050 5889	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	dokumen	50.000.000	APBD				
3.31.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3	data	500.000.000	APBD				

3.31.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah BerdasarkanN Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1	berita acara	50.000.000	APBD					
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3	dokumen	450.000.000	APBD		1	dokumen	267.623.500	
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3	laporan	50.000.000	APBD		5	laporan	157.500.000	
3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	laporan	150.000.000	APBD	Penyediaan data melalui aplikasi	1	laporan	150.000.000	
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel		1	Laporan	15.363.240.339			1	Laporan	14.158.627.507	
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	114	orang/bln	14.877.516.739	APBD		124	orang/bln	13.697.903.907	

3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	laporan	25.000.000	APBD		1	laporan	25.000.000	
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	laporan	435.723.600	APBD		1	laporan	435.723.600	
3.31.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kepmen 050 5889	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	dokumen	25.000.000	APBD		1	dokumen	25.000.000	
3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		1	Dokumen	150.000.000			1	Dokumen	135.000.000	
3.31.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	laporan	50.000.000	APBD		1	laporan	135.000.000	

3.31.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kepmen 050 5889	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	laporan	100.000.000	APBD		1	laporan	100.000.000	
3.31.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	dokumen	20.000.000	APBD		2	dokumen	20.000.000	
3.31.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	dokumen	10.000.000	APBD		1	dokumen	10.000.000	
3.31.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	dokumen	10.000.000	APBD		1	dokumen	10.000.000	
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian		1	Dokumen	423.000.000			1	Dokumen	337.500.000	
3.31.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	paket	200.000.000	APBD		1	paket	200.000.000	
3.31.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6	orang	153.000.000	APBD		6	orang	67.500.000	

3.31.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15	orang	70.000.000	APBD		15	orang	70.000.000	
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah		8	Layanan	2.857.613.000			8	Layanan	1.574.625.000	
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	paket	75.000.000	APBD		1	paket	75.000.000	
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	paket	1.070.113.000	APBD	Peralatan kantor penunjang aplikasi SRIKANDI, kearsipan dan penatausahaan Keuangan serta administrasi 10 unit, Scanner 3 unit, Printer 3 unit, Layar Interakitf 3 unit,Laptop 2 unit	1	paket	140.000.000	

3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	paket	150.000.000	APBD		2	paket	237.000.000	
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	paket	75.000.000	APBD		1	paket	75.000.000	
3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	dokumen	75.000.000	APBD			dokumen	10.125.000	
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	150	laporan	650.000.000	APBD			laporan	850.000.000	
3.31.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	dokumen	262.500.000	APBD	Untuk Record center (perlu pembenahan untuk peningkatan penilaian arsip)	1	dokumen	112.500.000	

3.31.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	dokumen	500.000.000	APBD	Team Creator untuk mendesain pemasaran dan promosi, kemudian diperlukan untuk pengembangan medsos (IG dan FB) dan website SIHABOK yang akan kami hidupkan kembali dalam rangka pelaksanaan promosi pemasaran	1	dokumen	75.000.000	
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3	Jenis Pengadaan	2.180.750.000			3	Jenis Pengadaan	840.000.000	
3.31.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4	unit	1.260.000.000	APBD	pembelian 4 unit kendaraan dinas untuk kepala bidang yang sdh pembelian dari thn 2010 yang lalu	0	unit	-	

3.31.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	Unit Truk Sampah	630.750.000	APBD	Penambahan pagu diambil dari sub kegiatan lain, keperluan pembelian truk sampah menyesuaikan pagu yang ada di e katalog	1	Unit Truk Sampah;	550.000.000	
3.31.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	unit	200.000.000	APBD		2	unit	200.000.000	
3.31.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4	unit	90.000.000	APBD		4	unit	90.000.000	
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan		12	Bulan	12.299.733.743			12	Bulan	4.899.185.052	
3.31.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	laporan	2.024.000	APBD		1	laporan	6.000.000	

3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3	laporan	3.063.308.450	APBD		1	laporan	650.000.000	
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9	laporan	9.234.401.293	APBD	Penambahan pagu pemenuhan tenaga kebersihan Outsourcing pasar Mangkurawang dan Tangga Arung/Lapangan Pemuda 4.080.474.612, Penyediaan jasa keamanan pasar Pasar Mangkurawang dan Tangga Arung 2.910.823.255, Jasa pengelolaan parkir pasar 100.000.000	2	laporan	4.243.185.052	

3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah		1450	unit	1.969.549.710			1350	unit	1.219.549.710	
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	40	unit	141.233.100	APBD		40	unit	141.233.100	
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13	unit	378.316.610	APBD		13	unit	378.316.610	

3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8	unit	1.250.000.000	APBD	Rehab Gedung Kantor Perindustrian dan Perdagangan Jln. Imam Bonjol 500.000.000,00, Pembangunan outlet IKM dan sekretariat Dekranasda 200.000.000,00, Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor/Kantor Pengelola, 200.000.000,00, Rehab ruangan kerja 350.000.000,00	5	unit	500.000.000	
3.31.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	unit	100.000.000	APBD		1	unit	100.000.000	

3.31.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	unit	100.000.000	APBD		1	unit	100.000.000	
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Rekomendasi Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan		100	Persen	205.000.000			68	Persen	500.000.000	
3 30 02 2.01	Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin toko swalayan	Jumlah dokumen rekomendasi ijin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan yang diterbitkan		76	dokumen	85.000.000			68	dokumen	100.000.000	
3 30 02 2.01 01	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab Kukar	1	dokumen	85.000.000			80	dokumen	100.000.000	
3 30 02 2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Surat Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan per tahun		64	Surat TDG	35.000.000			52	Surat TDG	100.000.000	

3 30 02 2.02 01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	18 Kec	1	dokumen	35.000.000	APBD		52	dokumen	100.000.000	
3 30 02 2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang diterbitkan		15	dokumen	85.000.000			11	dokumen	150.000.000	
3 30 02 2.03 01	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik		1	dokumen	85.000.000			17	dokumen	150.000.000	
3 30 02 2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba Lanjutan dari waralaba luar negeri	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba Lanjutan dari waralaba luar negeri yang diterbitkan		4	dokumen	-			3	dokumen	150.000.000	

3 30 02 2.04 01	Fasilitasi pemenuhan lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik luar negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri		-	dokumen	-			4	dokumen	150.000.000	
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola		75,00	persen	17.155.000.000			65,00	persen	21.616.024.000	
		Pertumbuhan Pendapatan Pasar (Retribusi)		4,22	persen				3,62	persen		
		Indeks Kualitas Pasar		62,00	nilai				48,00	nilai		
3 30 03 2,01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola		4,00	unit	16.555.000.000			5,00	unit	21.116.024.000	

3 30 03 2,01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Desa Separi Kec Tenggarong Seberang, Pasar Desa Kota Bangun Ulu Kec.Kota Bangun, Pasar Desa Segihan Kecamatan Sebulu, Pasar Desa Perangat Baru Kecamatan Marang Kayu, Pasar Desa Kelekat Kecamatan Kembang Janggut, Pasar Desa Badak Baru Kecamatan Muara badak, Revitalisasi Pasar Mangkurawang, perbaikan turap pasar Mangkurawang 2, Pasar Desa Rantau Hempang Kecamatan	8	unit	14.355.000.000	APBD		2	unit	20.916.024.000	

			Muara Kaman									

3 30 03 2,01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Gerbang Raja (Mangkuraw ang)	4	unit	2.200.000.000	APBD	Dalam rangka mengakomo dir kebersihan dan security, kemudian taman pasar, perencanaan IPAL pada pasar mangirawan g 1, revitalisasi IPAL pada pasar Mangkurawa ng 2 , Radio land (kelengkapa n dan peralatannya), lampu pasar	1	unit	200.000.000	
3 30 03 2,02	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerja (Unit Pengelola Pasar) yang memperoleh pembinaan		5,00	unit UPP	600.000.000			5,00	unit UPP	500.000.000	

3 30 03 2,02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Wonotirto Kec. Samboja, Pasar Mangkuraw ang Kec. Tenggarong.	3	dokume n	600.000.000	APBD	Penguatan Peran UPTD, terhadap sosialisasi kebijakan manajemen pasar, pengelolaan data pedagang, retribusi, kelayakan saran dan prasarana dan pengelolaan aplikasi manajemen pasar.	2	dokume n	300.000.000	
3 30 03 2,02 02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Wonotirto Kec. Samboja, Pasar Mangkuraw ang Kec. Tenggarong.	0	dokume n	-	APBD	Penyusunan kajian pasar terkait kelayakan pembanguna n pasar di seluruh kecamatan mengacu pada RTRW dan RPJPD	1	dokume n	200.000.000	
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga antar waktu		3,57	Persen	2.595.000.000			3,62	Persen	1.500.000.000	
		Persentase pupuk bersubsidi yang diawasi		98,39	Persen				98,21	Persen		

3 30 04 2,01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dijamin ketersediaannya		13	Jenis	300.000.000			13	Jenis	450.000.000	
3 30 04 2,01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	1	laporan	100.000.000	APBD		1	laporan	150.000.000	
3 30 04 2,01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	1	laporan	100.000.000	APBD	772.523.000	1	laporan	150.000.000	
3 30 04 2,01 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	1	laporan	100.000.000	APBD		1	laporan	150.000.000	

3 30 04 2,02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan Barang Penting di tingkat pasar kabupaten yang terkendali harga dan stoknya		66,67	Persen	2.075.000.000			58,33	Persen	600.000.000	
3 30 04 2,02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	1	laporan	250.000.000	APBD		1	laporan	150.000.000	
3 30 04 2,02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Kukar	1	laporan	50.000.000	APBD		1	laporan	150.000.000	

3 30 04 2,02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	20 Kec	20	laporan	1.775.000.000	APBD	Pelaksanaan Operasi Pasar Barang Kebutuhan Pokok di 20 Kecamatan dalam rangka penanganan inflasi	1	laporan	300.000.000	
3 30 04 2,03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pupuk dan Pestisida yang tersalurkan		86.819	Ton	220.000.000			84.546	Ton	450.000.000	
3 30 04 2,03 01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kab. Kukar	1	dokumen	50.000.000	APBD		18	dokumen	150.000.000	
3 30 04 2,03 02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kukar	1	laporan	35.000.000	APBD		1	laporan	150.000.000	
3 30 04 2,03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kab. Kukar	1	laporan	135.000.000	APBD		1	laporan	150.000.000	

3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan ekspor produk unggulan		100,00	Persen	1.420.000.000			100,00	Persen	1.000.000.000	
3 30 05 2,01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MoU Perdagangan Produk unggulan ekspor		1	MoU	1.420.000.000			1	MoU	1.000.000.000	
3 30 05 2,01 01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Kec. Marang Kayu, Kec. Muara badak, Kembang Janggut, Muara Kaman	40	Pelaku Usaha	-	APBD	Tidak tersedia sub kegiatannya pada SIPD RI, di mapping ke sub kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	15	Pelaku Usaha	300.000.000	
3 30 05 2,01 02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Jakarta	7	Pelaku Usaha	775.000.000	APBD	Mengakomodir penambahan target output pelaku usaha dan lokasi pelaksanaan kegiatan.	6	Pelaku Usaha	300.000.000	
3 30 05 2,01 03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Kec. Tenggarong, Kec. Sanga-Sanga, Kota Samboja,Kota Muara	10	Pelaku Usaha	235.000.000	APBD		8	Pelaku Usaha	250.000.000	

			Badak									
3 30 05 2,01 04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Surabaya, Yogyakarta, Banjarmasin dan Makasar	3	Pelaku Usaha	235.000.000	APBD		3	Pelaku Usaha	250.000.000	
3 30 05 2,01 05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Kab. Kukar	6	Produk	175.000.000	APBD		10	Produk	200.000.000	
3 30 05 2,01 06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Kab Kukar	4	Pelaku Usaha	-	APBD	Tidak tersedia sub kegiatannya pada SIPD RI, di mapping ke sub kegiatanPameran dagang nasional	40	Pelaku Usaha	250.000.000	
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pertumbuhan pelaku usaha yang tertib niaga		30,00	Persen	985.000.000			28,25	Persen	550.000.000	
3 30 06 2,01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		19,41	Persen	985.000.000			19,06	Persen	550.000.000	

3 30 06 2,01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	18 Kecamatan	1.751	unit	810.000.000	APBD	Pembelian peralatan tera tera ulang alat UTTP dalam rangka peningkatan pelaksanaan tera yang akan mempengaruhi pencapaian target nilai IKK pada LPPD	1.500	unit	350.000.000	
3 30 06 2,01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	18 Kecamatan	1000	orang	175.000.000	APBD		1000	orang	200.000.000	
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan di toko modern		98,81	persen	685.000.000			98,56	persen	650.000.000	
3 30 07 2,01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase realisasi promosi		80	persen	685.000.000			70	persen	650.000.000	

3 30 07 2,01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Kukar	100	UMKM	250.000.000	APBD			UMKM	200.000.000	
3 30 07 2,01 02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Kab Kukar	50	UMKM	435.000.000	APBD	Program Dedikasi Bupati "Program Usaha Kecil Idaman"	20	UMKM	450.000.000	
3 30 07 2,01 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kaltim	1	dokumen	-	APBD	Tidak tersedia sub kegiatannya pada SIPD RI, di mapping ke sub kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	1	dokumen	200.000.000	
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dokumen perencanaan dan unit sentra pengembangan industri		1,00	dokumen	26.865.000.000			2,00	dokumen	3.950.000.000	
3 31 02 2,01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan jumlah sentra		1,00	Sentra IKM	26.865.000.000			1,00	Sentra IKM	3.950.000.000	

3 31 02 2,01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab Kukar	1	dokumen	600.000.000	APBD	Program Dedikasi Bupati "Program Hilirisasi Produk Pertanian"	1	dokumen	-	
3 31 02 2,01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab Kukar	1	dokumen	25.000.000.000	APBD	Diperlukan penambahan pagu dalam rangka penyelesaian pabrik minyak makan merah terintegrasi berbahan baku kelapa sawit dan peralatan.	1	dokumen	1.950.000.000	
3 31 02 2,01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Kukar	2	dokumen	1.065.000.000	APBD		2	dokumen	1.800.000.000	
3 31 02 2,01 06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab Kukar	1	dokumen	200.000.000	APBD		4	dokumen	200.000.000	
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Cakupan pemberian rekomendasi izin usaha industri		100	Persen	-			100	Persen	400.000.000	

3 31 03 2,01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah		88,65	Persen	-			88,65	Persen	400.000.000	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah		0,06	Persen				0,06	Persen		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di wilayah Kabupaten		0,06	Persen				0,06	Persen		

3 31 03 2,01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Kab Kukar	1	dokumen	-	APBD	Tidak tersedia sub kegiatannya pada SIPD RI, di mapping ke sub kegiatan lain	10	dokumen	150.000.000	
3 31 03 2,01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Tenggarong, Kec. Tenggaroang seberang, Kec. Kembang janggut, Kec. Muara Jawa, Kec. Loa Janan dan Kec. Anggana	1	dokumen	-	APBD	Tidak tersedia sub kegiatannya pada SIPD RI, di mapping ke sub kegiatan lain	20	dokumen	250.000.000	
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI	Persentase IKM yang dalam SIINAS		5,80	Persen	790.000.000			4,64	Persen	525.000.000	

	NASIONAL											
3 31 04 2,01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mendapatkan informasi industri secara lengkap dan terkini		50	IKM	790.000.000			44	IKM	525.000.000	
3 31 04 2,01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab Kukar	3	dokumen	415.000.000	APBD		1	dokumen	275.000.000	
3 31 04 2,01 02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab Kukar	1	dokumen	-	APBD	Tidak tersedia sub kegiatannya pada SIPD RI, di mapping ke sub kegiatan lain	1	dokumen	250.000.000	

3 31 04 2,01 03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab Kukar	2	dokumen	375.000.000	APBD		1	dokumen	250.000.000	
		Jumlah				87.213.886.792					54.575.634.769	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

5.1. CATATAN DALAM PENYUSUNAN RENJA

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 antara lain :

a. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara

b. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026, namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 perludilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sub kegiatan. Selanjutnya penyesuaian ini akan diakomodir pada saat dilakukannya penyusunan terhadap Renstra Tahun 2025-2029

c. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebagai komitmen untuk pelaksanaan

kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target perangkat daerah serta pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidahbpelaksanaan sebagai berikut :

a. Seluruh aparatur sipil negara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab dan berkewajiban untuk melaksanakan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sesuai tugas dan kewenangannya
b. Menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah yakni RPJMD dan RKPD dengan dokumen perencanaan perangkat daerah yakni RENSTRA dan RENJA
c. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 menjadi dasar dalam penyusunan RKA dan DPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2025
d. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunana Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintajh Daerah.
e. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

f. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Program, kegiatan dan Sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkag-langkah sebagai berikut :

a. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja untuk setiap triwulannya
b. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja maka dokumen Rencana Kerja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku
c. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025
d. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
e. Seluruh aparatur sipil negara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara perlu meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Disperindag Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai dokumen perencanaan tahunan organisasi perangkat daerah.

dd. RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERLANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Dearah (PD) diwajibkan menyusun dokumen perencanaan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) untuk periode selama 1 (satu) tahun sebagai langkah strategis dalam mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang ingin capai dalam perencanaan jangka menengah.

Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan terjemahan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan serta mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.

Dan untuk mendukung visi misi Bupati Kutai Kartanegara tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk mewujudkan sinergitas antar Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Pengakat Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

b. Tujuan

1. Menyediakan Dokumen Perencanaan Tahunan DPMPTSP yang akan dilaksanakan Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Menyediakan Sarana Pengendalian Program dan kegiatan Tahun 2025;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

Bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah serta Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional serta tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan Program dan Kegiatan berisi penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta tabel rencana program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Katanegara pada Tahun 2023 menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Setiap program selanjutnya disusun dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung. Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka menunaikan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai organisasi perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, setiap program dan kegiatan dibebani suatu indikator kinerja. Program dibebani indikator kinerja yang bersifat hasil (outcome) sedangkan kegiatan dibebani indikator kinerja yang bersifat keluaran (output). Target capaian kinerja ditetapkan dalam renstra untuk lima tahun dan dijabarkan dalam target kinerja tahunan dalam renja.

Tahap berikutnya diuraikan rangkaian pengukuran kinerja pengelolaan sumber daya keuangan berdasarkan sasaran strategis jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya Realisasi Investasi

Sasaran 1 ditunjang dengan 6 (enam) Program dan 13 (Tiga Belas) kegiatan, berikut capaian kinerja Sasaran 1 tersaji dalam tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1.

Sasaran 1 Perangkat Daerah

Sasaran	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Realisasi Investasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	80	94,96	118,7
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Proyek	640	1703	266,09
	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor	260	284	109,23
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan dan Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	30,47	51,38	168,62

Sumberdata: E-Pantau Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2023

Dilihat dari pencapaian Sasaran 1 kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bisa dikatagorikan “Sangat Baik”. Target realisasi investasi tahun 2023 ditetapkan pencapaiannya sebesar Rp 14,80 Triliun. Dimana Realisasi Investasi ini tercatat, dengan rincian realisasi PMDN sebesar Rp 9,80 Triliun (1699 proyek) dan realisasi PMA sebesar Rp 5,00 Triliun (229 proyek).

Dilihat berdasarkan sektor usaha maka realisasi investasi PMDN yang dapat dicapai sampai dengan tahun 2023 menunjukkan subsektor Pertambangan yang menunjukkan capaian realisasi tersebesar Rp. 7,89 Milyar

Penyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 9.659 orang dan 25 orang. Walaupun dalam pencapaian sasaran ini kami harus melakukan penambahan anggaran dikarenakan anggaran murni kami masih kurang untuk pencapaian output guna menjalankan paket-paket pekerjaan dalam pencapaian target.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal

Sasaran 2 ini ditunjang dengan 2 (Dua) program dan 2 (Dua) kegiatan, berikut capaian kinerja Sasaran 2 tersaji dalam tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2.

Sasaran 2 Perangkat Daerah

Sasaran	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Izin	1000	12.796	1279,60
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Aplikasi	3	4	133,33

Sumberdata: E-Pantau Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2023

Dilihat dari pencapaian Sasaran 2 kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bisa dikatagorikan “Sangat Baik”. Walaupun dalam pencapaian sasaran ini kami juga harus melakukan penambahan anggaran dikarenakan anggaran murni kami masih kurang untuk pencapaian output guna menjalankan paket-paket pekerjaan dalam pencapaian target. Ditambah dengan adanya MPP (Mal Pelayanan Publik) yang baru berjalan dengan beban anggarannya masuk pada sasaran kegiatan ini.

Bersadarkan Reviu Hasil pengukuran capaian kinerja tiap tahun atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam renja dan renstra disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Tabel T-C . 29) menyajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara dan pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2026.

Tabel 3.

T-C 29 . Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaiaan RENSTRA Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2024

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target kinerja capaian program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2022)		Target dan realisasi kinerja program dan Program kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD tahun 20225)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan (2024)	
											Target RENJA - PD TAHUN (2023)	Realisasi RENJA - PD Triwulan (2023)	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	*18*	*1*			*Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota*	*Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*	*88*	*Nilai*	*86*	*Nilai*	*86*	*94,90*	*110,35*	*94,9*	*276*	*313,41*
2	18	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran & Evaluasi Kinerja	12	dokumen	17	Dokumen	17	17	100,00	15	49	408,33
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanann Perangkat Daerah	Jumkah Dokumen Perencanaan PD	12	Dokumen	4	Dokumen	4	4	100,00	4	12	100,00
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil	1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	100,00	4	6	600,00

						koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD										
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahann RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	100,00	0	2	200,00
2	18	01	2.01	04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	100,00	0	2	200,00
2	18	01	2.01	05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	100,00	0	2	200,00
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	6	Laporan	9	Laporan	9	9	100,00	6	24	400,00
2	18	01	2.02		Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	100	Persentase	100	Persentase	100	100	100,00	100	100	100,00

2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98	Orang /Bulan	84	Orang /Bulan	84	84	100,00	70	175	178,57
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	1	100,00	1	5	500,00
2	18	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	Dokumen	5	Dokumen	5	5	100,00	5	15	300,00
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	3	Laporan	3	Laporan	3	3	100,00	3	9	300,00
2	18	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	100,00	1	3	300,00

2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Dearah	Cakupan Administrasi BMD	15	Dokumen	5	Dokumen	5	5	100,00	100	110	733,33
2	18	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1	1	2	1	50,00	1	3	300,00
2	18	01	2.03	05	Rekonsilisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2	Laporan	4	4	4	4	100,00	4	12	600,00
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian	1	Persentase	100	Persentase	100	100	100,00	100	204	204,00
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beseta Atribut Kelengkapannya	300	Paket	2	Paket	2	2	100,00	4	24	8,00
2	18	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	100	Dokumen	100	100	100,00	4	204	20400,00
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15	Orang	15	Orang	15	15	100,00	20	50	333,33
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perudang - Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan tekhnis implementasi	75	Orang	102	Orang	102	102	100,00	150	354	472,00

						peraturan perundang-undangan										
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	100	Persentase	100	Persentase	100	100	100,00	100	300	300,00
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35	Paket	70	Paket	70	70	100,00	1	142	405,71
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	25	Paket	40	Paket	40	40	100,00	1	92	368,00
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	22	Paket	22	Paket	22	22	100,00	2	56	254,55
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	500	Dokumen	1	Dokumen	1	1	100,00	12	502	100,40
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200	Laporan	400	Laporan	400	400	100,00	12	812	406,00
2	18	01	2.06	10	Pengelolaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	500	Dokumen	500	Dokumen	500	500	100,00	500	1500	300,00

2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan BMD	100	Persentase	100	Persentase	100	100	100,00	100	300	300,00
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainya yang disediakan	10	Unit	46	Unit	46	46	100,00	70	95	950,00
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa	100	Persentase	100	Persentase	100	100	100,00	100	300	300,00
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500	Laporan	2	Laporan	2	2	100,00	3	16	0,64
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	12	100,00	12	48	400,00
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50	Laporan	3	Laporan	3	3	100,00	12	18	36,00
18	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	49	Laporan	12	Laporan	12	12	100,00	24	48	97,96
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD	108	Persentase	100	Persentase	100	100	100,00	100	300	277,78

2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	48	Unit	48	Unit	48	48	100,00	144	240	500,00
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	60	Unit	60	Unit	60	60	100,00	60	180	300,00
2	*18*	*02*			*Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal*	*Jumlah Proyek (PMA/PMDN)*	*3267*	*Proye k*	*640*	*Proye k*	*640*	*1703*	*266,09*	*665*	*3008*	*92,07*
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Kajian dan peta potensi investasi*	*1*	*Doku men*	*3*	*Doku men*	*3*	*3*	100,00	*1*	7	700,00
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota	1	*Doku men*	1	*Doku men*	1	1	100,00	1	3	300,00
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota	1	Doku men	3	3	3	3	100,00	1	7	700,00
2	*18*	*03*			*Program Promosi Penanaman Modal*	*Junlah Investor (PMA/PMDN)*	*350*	*Inve stor*	*260*	*Investor*	*260*	*284*	*109,23*	*340*	*884*	*252,57*
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	1460	Invest or	112	Invest or	260	284	109,23	340	854	58,49

2	18	02	2.02	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan kabupaten/Kota	1	Dokumen	2	Dokumen	2	2	100,00	1	5	500,00
2	18	02	2.02	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4	Dokumen	5	Dokumen	5	4	80,00	4	13	325,00
2	*18*	*04*			*Program Pelayanan Penanaman Modal*	*Jumlah Penerbitan Izin*	*4750*	*Izin*	*1000*	*Izin*	*1000*	*12.796*	*1279,60*	*12000*	*25796*	*543,07*
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan Masyarakat	92	Nilai	87,12	Nilai	87,75	91,96	101,53	91,96	271,04	294,61
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik	500	Pelaku Usaha	2000	Pelaku Usaha	2000	2000	100,00	500	4500	900,00

2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhuan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	500	Kegiatan Usaha	300	Kegiatan Usaha	300	300	100,00	500	1100	220,00
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan	500	Orang	300	Orang	100	100	100,00	500	300	60,00
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	500	Kegiatan Usaha	500	Kegiatan Usaha	500	500	100,00	500	1500	300,00
2	*18*	*05*			*Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*	*Kenaikan / Penurunan Nilai Realisai PMDN*	*2*	*Persentase*	*30,5*	*Persentase*	*30,47*	*30,47*	*100,00*	*30,68*	*61,25*	*3062,50*

2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Dearah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengendalian PMDN/PMA*	*2240*	*Jumlah Usaha/Kegiatan*	*300*	*Jumlah Usaha/Kegiatan*	*550*	*550*	100,00	*1020*	2.120	94,64
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	550	Kegiatan Usaha	100	Kegiatan Usaha	100	100	100,00	100	300	54,55
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	500	Pelaku Usaha	300	Pelaku Usaha	300	300	100,00	100	700	140,00
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan	250	Kegiatan Usaha	100	Kegiatan Usaha	100	100	100,00	100	300	120,00
2	*18*	*06*			*Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal*	*Jumlah Aplikasi*	*3*	*Aplikasi*	*3*	*Aplikasi*	*3*	*4*	*133,33*	*3*	*10*	*333,33*

2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Aplikasi*	*15*	*Aplikasi*	*3*	*Aplikasi*	*3*	*4*	133,33	*3*	10	66,67
2	18	06	2.01	01	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	80	Dokumen	4436	Dokumen	4436	4436	100,00	3	8875	11093,75

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan dokumen Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara seluruh program kegiatan yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah tercapai di tahun 2024. Dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diamanatkan untuk:

1. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMDN/ PMA
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama kurun waktu Januari-Desember 2023 berhasil mencatat realisasi investasi sebesar Rp. 14,80 T, berhasil mencapai 204% dari target yang ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara sebesar Rp. 7,2 T.

Sejalan dengan keberadaan kebijakan pemerintah untuk hilirisasi sumber daya alam dan Ibu Kota Negara membuat peningkatan investasi meningkat setiap tahunnya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sepanjang tahun 2023 telah menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 10.871, dimana penerbitkan NIB ini terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun 2018 sebanyak 274 sejalan dengan fokus pemerintah untuk mengembangkan pelaku UMKM.

Termasuk dalam amanat tersebut adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang urusan yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara. Dimana nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 91,96 terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Indikator kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara terletak pada sasaran pembangunan dalam renstra. Indikator kinerja pelayanan merupakan indikator kinerja yang bersifat hasil (outcome) dan menggambarkan indikator kinerja program-program yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran pembangunan dimaksud. Indikator kinerja pelayanan ini dapat berupa indikator kinerja standar pelayanan minimal (SPM), indikator kinerja kunci (IKK) maupun indikator yang dikreasikan guna

mengukur tingkat layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan pada Tabel T-C.30. (terlampir). Termasuk dalam analisis tersebut adalah proyeksi kinerja pelayanan tahun rencana dan satu tahun maju.

Tabel 4

T - C .30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah/target Penanaman Modal PMDN/PMA (Triliyun Rupiah)			7	7,2	7,35	7,4	7,45	14,80	15,10	15,35	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			87,12	87,75	88,25	89,52	91,73	91,96	93	95,20	

Sumber Data : Renstra DPMPTSP

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh

Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
e. pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang diberikan oleh Bupati; dan
f. penyusunan laporan di Bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Sesuai dengan tugas dan fungsi di atas maka DPMPTSP juga bertanggungjawab untuk menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan pelayanan yang terpadu bagi Masyarakat maupun investor. Melalui Langkah-Langkah seperti penerapan teknologi informasi, pelatihan pegawai dan peningkatan transparansi sistem birokrasi.

2.3.2 Pengembangan perekonomian berkelanjutan

Dalam Pengembangan Perekonomian berkelanjutan DPMPTSP memainkan peran penting dalam memfasilitasi investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta DPMPTSP dapat mempromosikan praktik bisnis yang bertanggungjawab secara sosial dan lingkungan, mempercepat proses perizinan bagi proyek-proyek yang mendukung pembangunan berkelanjutan serta mengawasi implementasi

kebijakan lingkungan dan pembangunan pada setiap proyek yang ditangani melalui :

a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik terkait Perizinan Berusaha berbasis risiko;
b. Memfasilitasi kemitraan usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
c. Memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
d. Penyelesaian Permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha;
e. Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi pelaku usaha dan UMK serta non UMK;
f. Pengawasan Perizinan berbasis risiko dengan pengawasan (rutin terjabwal) serta pengawasan insidential (Tanpa pemberitahuan) terhadap pelaku usaha ataupun kegiatan usaha.

2.3.3 Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

a. DPMPTSP mempunyai Peran yaitu memfasilitasi proses percepatan perizinan bagi investor ataupun pemangku kepentingan yang terlibat pada proyek-proyek yang mendukung Pembangunan IKN sebagai mitra sesuai kewenangan Kabupaten Kutai Kartanegara;
b. Pembuatan Peta Potenasi Zona Industri Pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN);
c. Memfasilitasi kerjasama kemitraan usaha besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi kewenangan Kutai Kartanegara untuk mendukung kebutuhan pembangunan IKN.

Untuk menjawab Isu-Isu tersebut peran Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara dan terhadap Capaian Program Daerah Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara "***Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berbahagia*** "

Dengan Misi Bupati Kutai Kartanegara, yaitu

1. Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani.

2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manuasia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastuktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah.
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya reviu terhadap rancangan awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsisten subtansi Renja DPMPTSP dengan berbagai rumusan yang tertuang dalam rancangan awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target Program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Pada akhirnya renja OPD juga akan mengalami Penyempurnaan setelah rancangan RKPD tersebut telah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati. Hasil telaahan terhadap Reviu rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

Tabel 5

T-C 31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal				**20.433.370.644,00**					**27.786.705.030,00**	
I	***Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	***Kab. Kutai Kartanegara***	***Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)***	***94,90 Nilai***	***16.133.370.644,00***	***Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	***Kab. Kutai Kartanegara***	***Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)***	***94,90 Nilai***	***18.856.822.130,00***	
A	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**Jumlah Dokumen Perencanaan PD**	**13 Dokumen**	**1.195.423.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**Jumlah Dokumen Perencanaan PD**	**19 Dokumen**	**1.192.000.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Dokumen Perencanann Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	4 Dokumen	571.836.500,00	Penyusunan Dokumen Perencanann Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	5 Dokumen	592.000.000,00	Penambahan Pagu Anggaran dilakukan untuk paket pekerjaan Penyusunan RENSTRA PD, RENJA Perubahan 2025, RENJA 2026, RENJA ZI, dan RENJA RB
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	85.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	50.000.000,00	Pengurangan Pagu Anggaran dari Hasil Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi	6 Dokumen	538.586.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi	1 Dokumen	50.000.000,00	Pengurangan Pagu Anggaran dari Hasil Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Realisasi Kinerja SKPD		Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 laporan	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	150.000.000,00	Penambahan Pagu Anggaran dan Sub Kegiatan dari Hasil Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA
5	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung	0 Dokumen	-	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata	1 Dokumen	50.000.000,00	Penambahan Pagu Anggaran dan Sub Kegiatan dari Hasil Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Statistik Sektoral Daerah					Pendukung Statistik Sektoral Daerah			
6	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup PD	0 Data	-	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup PD	1 Data	250.000.000,00	Penambahan Pagu Anggaran dan Sub Kegiatan dari Hasil Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA
7	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perancanaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen	0 Berita Acara	-	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang diampu dalam	1 Berita Acara	50.000.000,00	Penambahan Pagu Anggaran dan Sub Kegiatan dari Hasil Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Perangkat Daerah		Perencanaan Perangkat Daerah					rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
B	Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administasi Keuangan	100%	10.835.164.656,00	Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administasi Keuangan	100%	10.892.789.071,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan	70 orang/bulan	10.312.681.530,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan	66 orang/bulan	9.894.305.945,00	Pengurangan Pagu Anggaran dari Hasil Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA BAPPEDA, Serta Hasil Rekonsiliasi Data dan Realisasi Anggaran Dengan Bidang Anggaran BPKAD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	65.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	215.000.000,00	dilakukan penambahan sebesar Rp. 150.000.000 untuk

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Keuangan Akhir Tahun SKPD		SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD					SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD			penyusunan laporan keuangan akhir tahun dikarenakan kekurangan anggaran untuk Pencapaian Output
3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	77.483.126,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	7 Dokumen	377.483.126,00	dilakukan penambahan sebesar Rp. 300.000.000 untuk paket pekerjaan 1. TL Inspektorat 2. TL BPK 3. Penilaian Kinerja BKPM 4. Penilaiam Kinerja Kemenpan RB 5. Penilaian Kinerja Ombusmant 6. Penilaian Panji-Panji 7. Penilaian MCP KPK

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											dikarenakan kekurangan anggaran untuk pencapaian output
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keungan Bulanan/triwulan/semester SKPD	3 Laporan	350.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keungan Bulanan/triwulan/semester SKPD	3 Laporan	381.000.000,00	dilakukan penambahan sebesar Rp. 31.000.000 untuk paket pekerjaan Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan SKPD dikarenakan kurangnya anggaran untuk pencapaian output kegiatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Laporan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	30.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Laporan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000,00	dilakukan pengurangan pagu penambahan sebesar Rp. 5.000.000
C	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Dearah**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**Persentase Administasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**182.224.293,00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Dearah**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**Persentase Administasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**337.000.000,00**	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	1 Dokumen	40.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	2 Dokumen	25.000.000,00	Dilakukan Pengurangan Pagu Anggaran Sesuai dengan Hasil Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA
2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah hasil	1 laporan	-	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik	1 laporan	50.000.000,00	Penambahan Pagu Anggaran dan Sub Kegiatan dari Hasil Verifikasi Tim

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD					daerah hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD			Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA
3	Rekonsilisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2 laporan	142.224.293,00	Rekonsilisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	5 laporan	30.000.000,00	Dilakukan Pengurangan Pagu Anggaran Sesuai dengan Hasil Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	222.000.000,00	Penambahan Pagu Anggaran dan Sub Kegiatan dari Hasil Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA
5	Pemanfaaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai	Jumlah dokumen hasil Pemanfaaatan	1 Dokumen	-	Pemanfaaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai	Jumlah dokumen hasil	1 Dokumen	10.000.000,00	Penambahan Pagu Anggaran dan Sub Kegiatan dari Hasil

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
		Kartanegara	Barang Milik Daerah SKPD				Kartanegara	Pemanfaaatan Barang Milik Daerah SKPD			Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA
D	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**100%**	**-**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**100%**	**20.000.000,00**	
1	Perencanaan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Laporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	1 Dokumen	-	Perencanaan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Laporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	Penambahan Pagu Anggaran dan Sub Kegiatan dari Hasil Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA
2	Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaporan Pengelolaan	2 Dokumen	-	Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaporan Pengelolaan	2 Dokumen	10.000.000,00	Penambahan Pagu Anggaran dan Sub Kegiatan dari Hasil Verifikasi Tim

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
			Retrebusi Daerah					Retrebusi Daerah			Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA
F	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**Persentase Administrasi Kepegawaian**	**100%**	**552.000.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**Persentase Administrasi Kepegawaian**	**100%**	**552.000.000,00**	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beseta Atribut Kelengkapannya	1 paket	127.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beseta Atribut Kelengkapannya	1 paket	127.000.000,00	
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	100.000.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	100.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	75.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	75.000.000,00	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perudang - Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	75 Orang	250.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perudang - Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	75 Orang	250.000.000,00	
E	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**Persentase Administrasi umum**	**100%**	**1.254.951.019,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**Persentase Administrasi umum**	**100%**	**1.568.030.791,00**	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	170.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	300.000.000,00	dilakukan penambahan pagu sebesar Rp. 130.000.000 untuk pengadaan ATK DPMPTSP dan MPP dikarenakan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											pencapaian output kegiatan
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	250.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	293.079.772,00	dilakukan penambahan pagu sebesar Rp. 43.079.772 untuk keperluan logistik DPMPTSP dan MPP dikarenakan pencapaian output kegiatan
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	2 paket	100.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	2 paket	250.000.000,00	dilakukan penambahan pagu sebesar Rp. 150.000.000 untuk keperluan cetak dan penggandaan DPMPTSP dan MPP dikarenakan pencapaian output kegiatan
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Kab. Kutai	Jumlah Dokumen Bagan bacaan	12 Dokumen	30.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Kab. Kutai	Jumlah Dokumen Bagan	12 Dokumen	20.000.000,00	Dilakukan Pengurangan Pagu Anggaran Sesuai

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perundang - Undangan	Kartanegara	dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan			Peraturan Perundang - Undangan	Kartanegara	bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan			dengan Hasil Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	561.935.145,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	561.935.145,00	
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	500 Dokumen	50.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	500 Dokumen	50.000.000,00	
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah kegiatan/berita	12 Dokumen	93.015.874,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah kegiatan/berita	12 Dokumen	93.015.874,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Elektronik pada SKPD										
F	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**361.000.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**361.000.000,00**	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah unit peralatan dan mesin lainya yang disediakan	20 Unit	361.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah unit peralatan dan mesin lainya yang disediakan	20 Unit	361.000.000,00	
G	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**Persentase Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS**	**100%**	**1.364.757.676,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**Persentase Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS**	**100%**	**2.805.382.268,00**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan	2 Laporan	5.599.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan	2 Laporan	3.000.000,00	Dilakukan Pengurangan Pagu Anggaran Sesuai dengan Hasil

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jasa Surat Menyurat					Jasa Surat Menyurat			Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	138.600.000,00	Penambahan Pagu Anggaran dari Hasil Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA BAPPEDA, Serta Hasil Rekonsiliasi Data dan Realisasi Anggaran Dengan Bidang Anggaran BPKAD
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.089.678.676,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.527.540.268,00	dilakukan pembahan pagu sebesar Rp.1.438.783.364untuk 1. THL 2. Tenaga Teknis 3. Tenaga teknis Administrasi 4. jasa kebersihan dikarenakan kurang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
											anggaran untuk pencapaian output kegiatan
4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	149.480.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	136.242.000,00	dilakukan pembahan pagu sebesar Rp. 13.238.000 untuk biaya perbaikan dan pemeliharaan barang DPMPTSP dan MPP dikarenakan kurangnya anggaran untuk pencapaian output kegiatan
H	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan**	**100%**	**387.850.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang**	**100%**	**1.128.620.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Pemerintah Daerah		**pemerintah daerah**					**urusan pemerintah daerah**			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	144 Unit	263.620.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	144 Unit	498.620.000,00	Dilakukan penambahan pagu sebesar Rp.235.000.000 1. BBM 2. Service 3. Suku cadang dikarenakan kurangnya anggaran untuk pencapaian ouput kegiatan
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	60 Unit	59.230.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	80 Unit	80.000.000,00	Dilakukan penambahan pagu sebesar Rp.20.770.000 untuk keperluan pemeliharaan 1. Komputer 2. Printer 3. Kulkas 4. TV

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											5. Dispenser 6. Kursi 7. Refarasi Kunci dikarenkan kurangnya anggaran untuk pencapaian output kegiatan
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan gedung laiinya yang dipelihara /direhabilitasi	2 Unit	65.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan gedung laiinya yang dipelihara /direhabilitasi	3 Unit	550.000.000,00	dilakukan penambahan pagu sebesar Rp. 485.000.000 1. Rumah Jabtan 2. Ruang Kerja Kepala Dinas 3. Ruang Rapat DPMPTSP 4. Ruang Kerja DPMPTSP dikarenkan untuk Penyimpanan dokumen arsip DPMPTSP dan kenyamanan kerja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
II	***Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal***	***Kab. Kutai Kartanegara***	***Jumlah Pertumbuhan Proyek PMDN/PMA***	***665 Proyek***	***1.050.000.000,00***	***Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal***	***Kab. Kutai Kartanegara***	***Jumlah Pertumbuhan Proyek PMDN/PMA***	**665 Proyek**	***2.600.000.000,00***	
A	**Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**Jumlah Kebijakan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**1 Dokumen**	**200.000.000,00**	**Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**Jumlah Kebijakan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	1 Dokumen	**500.000.000,00**	
1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan	Dokumen		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan	Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Penanaman Modal		Penanaman Modal					Penanaman Modal			
2	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	30 Dokumen	200.000.000,00	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kajian Kebijakan Daerah Perundangan di bidang Penanaman Modal	100 Dokumen	500.000.000,00	dilakukan penambahan pagu sebesar Rp. 300.000.000 dikarenakan kurangnya anggaran untuk pencapaian output
B	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kajian dan Peta Potensi Investasi	3 Dokumen	**850.000.000,00**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kajian dan Peta Potensi Investasi	3 Dokumen	**2.100.000.000,00**	
1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	1 Dokumen	200.000.000,00	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal	*1 Dokumen*	300.000.000,00	Dilakukan penambahan pagu anggaran senilai Rp. 100.000.000 untuk Pembuatan RUPM sesuai dengan Visi Misi Bupati terpilih 2025-2030

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
			Kabupaten/Kota					Daerah Kabupaten/ Kota			
2	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Daerah		Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Daerah		
3	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	650.000.000,00	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	1.800.000.000,00	dilakukan penambahan pagu sebesar Rp. 1.150.000.000 untuk menambah aut put kegiatan berupa Investemnt Project Ready to Over (IPRO) potensi investasi melalui promosi yang ditawarkan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
											untuk menarik calon investor di kab. Kutai Kartanegara
III	***Program Promosi Penanaman Modal***	***Kab. Kutai Kartanegara***	***Jumlah Investor (PMA/PMDN)***	***340 Investor***	***1.200.000.000,00***	***Program Promosi Penanaman Modal***	***Kab. Kutai Kartanegara***	***Jumlah Investor (PMA/PMDN)***	**340 Investor**	***1.550.000.000,00***	
A	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**Jumlah Investor (PMA/PMDN)**	**340 Investor**	**1.200.000.000,00**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**Jumlah Investor (PMA/PMDN)**	340 Investor	**1.550.000.000,00**	
1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	JumlahPeraturan Daerah (Perda) yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan	1 Dokumen	200.000.000,00	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	JumlahPeraturan Daerah (Perda) yang Mengatur Promosi Penanaman Modal	2 Dokumen	600.000.000,00	dilakukan penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 400.000.000 untuk melakukan penyusunan Analisis Negara Sumber Modal

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
			kabupaten/Kota					Kewenangan kabupaten/ Kota			Asing dan pembuatan video promosi penanaman modal, serta pembuatan Video Promosi Layanan MPP Kutai Kartanegara
2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan PromosiPenanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1.000.000.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan PromosiPenanaman Modal Kabupaten/ Kota	6 Dokumen	950.000.000,00	Dilakukan Pengurangan Pagu Anggaran Sesuai dengan Hasil Verifikasi Tim Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA
IV	***Program Pelayanan Penanaman Modal***	***Kab. Kutai Kartanegara***	***Jumlah Penerbitan Izin***	***10.000 Izin***	***850.000.000,00***	***Program Pelayanan Penanaman Modal***	***Kab. Kutai Kartanegara***	***Jumlah Penerbitan Izin***	**12.000 Izin**	***1.650.000.000,00***	
A	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**91,96 Nilai**	**850.000.000,00**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	91,96 Nilai	**1.650.000.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					**Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					
1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	500 Pelaku Usaha	200.000.000,00	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	1200 Pelaku Usaha	600.000.000,00	dilakukan penambahan pagu sebesar Rp. 400.000.000 dari kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah karena kurangnya anggaran untuk pencapaian ouput kegiatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	200.000.000,00	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	450.000.000,00	dilakukan penambahan pagu sebesar Rp. 250.000.000 karena sebelumnya tidak cukup untuk SKM Ekternal dan IPK MPP
3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di	300 Kegiatan Usaha	450.000.000,00	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan	650 Kegiatan Usaha	600.000.000,00	dilakukan penambahan pagu sebesar Rp.150.000.000 karena pagu anggaran untuk pencapaian output

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			bidang Perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha					pelaporan di bidang Perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha			
V	***Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal***	***Kab. Kutai Kartanegara***	***Penaikan / Penurunan Nilai Realisasi (PMDN)***	***30.75%***	***700.000.000,00***	***Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal***	***Kab. Kutai Kartanegara***	***Penaikan / Penurunan Nilai Realisasi (PMDN)***	**30.68%**	***1.200.000.000,00***	
A	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Dearah**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**Jumlah Pengendalian PMA / PMDN**	**300 Pelaku usaha/kegiatan usaha**	**700.000.000,00**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Dearah Kabupaten/Kota**	**Kab. Kutai Kartanegara**	**Jumlah Pengendalian PMA / PMDN**	1020 Pelaku usaha/ kegiatan usaha	**1.200.000.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Kabupaten/Kota										
1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	100 Kegiatan Usaha	200.000.000,00	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan	100 Kegiatan Usaha	200.000.000,00	
2	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implemtasi Perizinan Berusaha	100 Pelaku Usaha	200.000.000,00	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implemtasi Perizinan Berusaha	400 Kegiatan Usaha	600.000.000,00	Dilakukan penambahan pagu anggaran sebesar 400.000.000,00 untuk pencapaian outcome

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Berbasis Resiko					Berbasis Resiko			
3	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Dilapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan	24 Kegiatan Usaha	300.000.000,00	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Dilapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian	100 Kegiatan Usaha	400.000.000,00	dilakukan penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000 karena anggaran kurang untuk pencapaian output kegiatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi Detail**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
			Perizinan Berusaha					Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			
VI	***Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal***	***Kab. Kutai Kartanegara***	***Jumlah Aplikasi***	***3 Aplikasi***	***500.000.000,00***	***Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal***	***Kab. Kutai Kartanegara***	***Jumlah Aplikasi***	3 Aplikasi	***1.929.882.900,00***	
A	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aplikasi	3 Aplikasi	500.000.000,00	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aplikasi	3 Aplikasi	1.929.882.900,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	500.000.000,00	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	10 Dokumen	1.929.882.900,00	dilakukan penambahan pagu sebesar Rp.1.429.882.900 untuk pengembangan dan maintance terhadap aplikasi yang ada, baik untuk DPMPTSP dan MPP serta Rehap Drive True dan Pembuatan Taman Pada MPP

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Jangka Panjang Nasional di Bidang Investasi Tahun 2025-2045 Menuju Indonesia Emas 2045 yaitu “Negara Nusantara berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” dimana Negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradapan bahari sebagai poros maritim dunia. Dimana berdaulat itu sendiri terdiri dari Ketahanan, Kesatuan, Mandiri dan aman bagi para investor. Maju dimana berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil bagi semua pihak baik itu masyarakat maupun investor. Berkelanjutan dimana Investasi yang ditawarkan merupakan investasi yang lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. 5 (Lima) sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yaitu:

1. Pendapatan Perkapita setara negara maju;
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang;
3. Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia Internasional meningkat;
4. Daya saing Sumber daya manusia meningkat; dan
5. Intensitas Emisi GRK menurun menuju Net zero emission.

Dan untuk mendukung lima misi tersebut terdapat 8 (Delapan) misi (Agenda) Pembangunan 2045 yaitu:

Transformasi Indonesia

1. Transpormasi Sosial;
2. Transpormasi Ekonomi;
3. Transpormasi tata kelola.

Landasan Transpormasi

Supermasi Hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia;

Ketahanan Sosial Budaya dan ekologi.

Kerangka Implementasi Transpormasi

1. Pembangunan kewilayahan yang merata dan bereadilan;
2. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
3. Kesinambungan Pembangunan

Untuk mewujudkan visi Indonesia emas Tahun 2045 kementerian Investasi/BKPM membuat arah kebijakan Investasi yaitu:

1. Investasi yang diprioritaskan untuk mengembangkan industri prioritas, mendukung transpormasi digital, moderenisasi dan digitalisasi pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, industri kreatif dan pariwisata;
2. Investasi berorientasi ekspor yang dapat mengembangkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif dan meningkatkan partisipasi dalam rantai produksi global;
3. Investasi hijau untuk mempercepat penerapan ekonomi hijau terutama percepatan transisi, energi, implementasi ekonomi sirkular, pengembangan transpormasi hijau dan adopsi teknologi hijau;
4. Investasi dalam infrastruktur konektifitas dan logika untuk mendorong integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global;
5. Invetasi yang berorientasi riset dan inovasi;
6. Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan Investasi Pusat-daerah dengan kebijakan ketenagakerjaan, energi, perdagangan, tata ruang, fiskal dan pembiayaan;
7. Iklim Investasi dan kepastian berusaha yang mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing;
8. Efektivitas pemberian insentif dan kemudahan investasi agar lebih tepat sasaran dan transparan, disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor dan wilayah;
9. Fasilitas Investasi Indonesia di luar negeri dengan pemanfaatan jaringan diaspora Indonesia.

Untuk mndukung arah kebijakan Nasional tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan melakukan :

1. Mendorong Investasi yang mengembangkan industri prioritas, mendukung transpormasi digital, moderenisasi dan digitalisasi pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, industri kreatif dan pariwisata;
2. Membuat Peta potensi berstandar IPRO untuk green Investasi dan Blue Investasi;
3. Meningkatkan Iklim Investasi dan kepastian berusaha yang mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing;
4. Mendorong Percepatan PERDA Pemberian insentif dan kemudahan Berusaha di Kabupaten Kutai kartanegara;

5. Meningkatkan Pelayanan Perizinan dengan mengciptakan inovasi-inovasi baru sehingga mempermudah pelaku usaha dan stakeholder dalam pengurusan perizinan;
6. Meningkatkan SDM Aparatur pada DPMPTSP dan MPP;
7. Menjalin koordinasi dan komunikasi antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan selaras terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Koordinasi dan komunikasi antar instansi ini melibatkan Dinas / Instansi Teknis dan pihak-pihak terkait lainnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Dalam mendukung visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara (2021 – 2026), tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara tahun 2025 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan penanaman modal yaitu misi 1 dan 3:

Misi 1

“Memantafkan Birokrasi yang Bersih Efektif, Efisien dan Melayani “

Misi 3

“Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif “.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, yaitu “Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA” dengan indikator tujuan “Nilai Realisasi

Investasi PMDN/PMA" dan tujuan "Meningkatkan Kualitas Pelayanan di DPMPTSP" dengan Indikator "Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)". Keterpaduan kedua indikator tersebut menuju pada Meningkatkan Daya Saing Investasi Daerah pada RPJMD 2021-2026. Seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 6

Tujuan dan Sasaran

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4
1	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA	Nilai Realisasi Insvestasi (PMDN/PMA)
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan di DPMPTSP	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dan untuk tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan target kinerja perangkat daerah yaitu pada tabel;

Tabel 7

TARGET DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	Target Renstra SKPD				
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA	Nilai Realisasi Insvestasi (PMDN/PMA) Triliun Rupiah	7	7,2	7,35	7,4	7,45
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan di DPMPTSP	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,12	87,75	88,25	89,52	91,73

Sumber Data : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021-2026

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

a. Faktor- Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan Kegiatan.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai garda depan investasi di Kutai Kartanegara, menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan untuk meningkatkan daya saing investasi daerah pada PMDN maupun PMA dan memberikan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha dengan mengadakan pendampingan kepada pelaku usaha melalui inovasi PILOT (Pelayanan Izin *On The Sport*) dan Aplikasi PELONGSENG sebagai sarana pelayanan kepada semua *stakehoder* di Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka mendukung misi 1 Bupati Kutai Kartanegara yaitu Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani dan misi 3 Bupati Kutai Kartanegara yaitu Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

1. Permasalahan dan Hambatan

   Dalam rangka menjalankan program-program tersebut DPMPTSP juga menemukan beberapa permasalahan dan hambatan, berdasarkan Tugas dan Fungsi beberapa permasalahan dan hambatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain:

   a. Regulasi yang masih selalu berubah – ubah;
   b. Aplikasi Sistem Perizinan Berusaha masih dalam proses pengembangan;
   c. Kurangnya anggaran dalam pencapaian output;
   d. Kurangnya sinergisitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka mewujudkan perbaikan iklim investasi;

e. Belum Efektifnya Pengawasan penanaman modal;
f. Belum adanya kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;
g. Belum tersediannya data dan peta potensi investasi menunju sektor hilirisasi yang bersandar IPRO (Invesment Project To Over);
h. Belum adanya ISO 27001 tentang Keamanan Data Perizinan berbasis risiko baik itu di DPMPTSP dan di MPP;
i. Belum adanya ISO 37001:2016 Tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan baik itu di DPMPTSP maupun di MPP.

2. Tantangan dan Peluang

Dalam Meningkatkan Pelayanan perizinan dan investasi di Kutai Kartanegara, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi tantangan, antara lain:

a. Data peta potensi investasi belum berstandar IPRO sehingga informasi yang diberikan belum akurat dan belum tersebar luas kepada para pelaku usaha sehingga belum dapat menjual potensi di Kabupaten Kutai Kartanegara;
b. Peraturan Daerah tentang pemberian insentif fasilitas kemudahan Penanaman Modal belum juga disahkan menjadi PERDA Pemberian Falisitas/Insentif Kemudahan Berusaha;
c. Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi;
d. Tingginya target realisasi investasi dalam bidang Penanaman Modal;
e. Tingginya target rasio pertumbuhan investasi dalam bidang Penanaman Modal;
f. Adanya ketidak sikronisasi regulasi terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan antar K/L;
g. Kurangnya SDM yang handal dalam proses pelayanan perizinan dan investasi.

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

a. Besarnya dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap penanaman modal dan perizinan;
b. Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara dan iklim yang baik, sangat mendukung investasi di sektor pariwisata, pertambangan, perkebunan, pertanian dan perikanan.
c. Posisi geografis yang strategis karena sebagai IKN
d. Infrastruktur transportasi yang mulai membaik.

3. Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Prioritas Tahun 2025 Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan realisasi investasi PMDN dan PMA, serta pertumbuhan dan persebaran penanaman modal yang berorientasi kepada pengembangan potensi unggulan daerah dengan melakukan kajian peta potensi yang berstandar IPRO sehingga bisa menjual kepada para investor.

Beberapa langkah strategis yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal mengatasi masalah dan hambatan yang menjadi isi – isu strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu yaitu:

1. Penyusunan strategi dan peningkatan promosi penanaman modal yang lebih inovatif;
2. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan Berbasis Risiko dengan inovasi baru dibidang pelayanan perizinan;
3. Mengkoordinasikan RAPERDA investasi dalam pemberian insentif dan fasilitas kemudahan Penanaman Modal menjadi PERDA;
4. Peningkatan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan

berusaha berbasis risiko yang terintegrasi dengan SPAN Lapor;

5. Pemutakhiran data peta potensi investasi dan peluang usaha Kabupaten Kutai Kartanegara berstandar IPRO;
6. Peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
7. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (ASN dan Non ASN) pada DPMPTSP dan MPP;
8. Melakukan Sertifikasi ISO 27001 tentang Keamanan Data dan ISO 37001:2016 Tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan baik itu di DPMPTSP maupun di MPP;
9. Meningkatkan Kemitraan Pelaku UMKM dengan Pengusaha besar.

Dengan menjalankan Program dan Kegiatan yaitu :

1. Program Pengembangan Iklim Investasi Penanaman Modal,
   a. Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota;
   b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
2. Program Promosi Penanaman Modal
   Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Pelayanan Penanaman Modal,
   Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
   Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Dearah Kabupaten/Kota.
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
   Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Risiko yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan. Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara bersumber dari dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Oleh karena itu dalam pendanaan lebih difokuskan pada program dan kegiatan yang memiliki manfaat bagi Peningkatan realisasi Investasi dan peningkatan pelayanan perizinan berbasis risiko serta digambarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan yang akan digunakan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Iklim Investasi Penanaman Modal; Anggaran untuk program ini sebesar Rp2.600.000.000 Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Penanaman Modal, yang terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 1) Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp500.000.000 Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

      Fasilitasi Kemitraan Yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp500.000.000.

   b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Kegiatan 2), Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.100.000.000 Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp1.800.000.000;
      2) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp300.000.000.

2) Program Promosi Penanaman Modal;

Anggaran untuk program ini sebesar Rp1.550.000.000 Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Penanaman Modal, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

a) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp600.000.000;

b) Penyusunan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp950.000.000.

c) Program Pelayanan Penanaman Modal;

Anggaran untuk program ini sebesar Rp1.650.000.000 Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Pelayanan Perizinan, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik dengan anggaran Rp600.000.000;

b. Pemantauan, analisis,evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko dengan anggaran Rp600.000.000;

c. Penyediaan dan Pengelolaan layanan Konsultasi Perizinan Berbasis Risiko dengan anggaran sebesar Rp450.000.000.

3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

Anggaran untuk program ini sebesar Rp1.200.000.000 Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Penanaman Modal, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiataan Usahanya dengan anggaran Rp200.000.000;

b. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha dengan anggaran sebesar Rp600.000.000;

c. Pengawasan Penanaman Modal dengan anggaran Rp400.000.000.

4) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp1.929.882.900 Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Pelayanan Perizinan yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

Pengelolaan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan anggran sebesar Rp1.929.882.900.

5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan program yang berfokus pada kegiatan-kegiatan rutin penunjang penyelenggaraan pemerintahan anggaran untuk program ini sebesar Rp18. 856.822.130. yang meliputi 9 kegiatan dan 38 sub kegiatan yang diantaranya terdiri dari:

a. Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah terdiri dari 7 sub. Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp1.192.000.000 sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanann Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 592.000.000
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD anggaran sebesar Rp50.000.000
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp50.000.000
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp150.000.000
5. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah dengan anggaran sebesar Rp50.000.000
6. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah dengan anggaran sebesar Rp250.000.000

7. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp50.000.000.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 5 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp10. 892.789.071 sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 9.894.305.945;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp215.000.000;
3. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaandengan anggaran sebesar Rp377.483.126 ;
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp381.000.000;
5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran sebesar Rp25.000.000.

c. Kegiatan administrasi Barang Milik Daerah terdiri dari 5 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp337.000.000 sebagai berikut :

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp25.000.000;
2. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp50.000.000;
3. Rekonsilisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp30.000.000;
4. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp222.000.000;

5. Pemanfaaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp10.000.000;
6. Pemanfaaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp10.000.000.

d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp10.000.000 sebagai berikut:
   1. Perencanaan Pengelolaan Retrebusi Daerah dengan anggaran sebesar Rp10.000.000;
   2. Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah dengan anggaran sebesar Rp10.000.000.

e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 4 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp552.000.000 sebagai berikut :
   1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya dengan anggran sebesar Rp127.000.000;
   2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp100.000.000;
   3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp75.000.000;
   4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perudang – Undangan dengan anggaran sebesar Rp250.000.000.

f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 7 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp1.568.030.791 sebagai berikut :
   1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp300.000.000;
   2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp 293.079.772;
   3. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan dengan anggaran sebesar Rp250.000.000;
   4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan dengan anggaran sebesar Rp20.000.000;

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp561.935.145;
6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp50.000.000;
7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp93.015.874.

g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp361.000.000 sebagai berikut :
   1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp361.000.000.

h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 4 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp1.128.620.000 sebagai berikut:
   1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp3.000.000;
   2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp138.600.000;
   3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp2.527.540.268;
   4. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp136.242.000.

i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp1.128.620.000
   1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp498.620.000;
   2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp80.000.000;
   3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp550.000.000.

Hasil RENJA 2025 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara dari kegiatan dalam program ini nantinya akan memudahkan investor dalam menentukan nilai investasi dan menjadi acuan pengukuruan kenaikan/ penurunan nilai realisasi investasi. Program pelayanan penanaman modal berfokus pada kegiatan penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah Kutai Kartanegara. Kegiatan ini bertujuan memberikan kemudahan dalam proses perizinan bagi investor dan akses pengaduan masyarakat. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal berfokus pada kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, bertujuan untuk Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal berfokus pada kegiatan urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 disusun dengan memperhatikan target capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

c. Tabel Rencana Program dan Kegiatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 Untuk tahun 2025 terdiri dari 6 (Enam) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan dengan kebutuhan dana sesuai dengan pagu indikatif Rp20.433.370.644,00 dan telah diusulkan Pagu Indikatif menjadi Rp27.786.705.030,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan paket- paket pekerjaan penunjang pencapaian *outcome* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun rincian kegiatan program, keuangan dan asset sebagai berikut :

Tabel. 8

T-C . 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025

dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PERTUMBUHAN INVESTASI DAERAH	Kab. Kutai Kartanegara	30,75	27.786.705.030,00	APBD		*30,9*	32.621.208.213,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Kab. Kutai Kartanegara	*94,90 Nilai*	*18.856.822.130,00*	APBD		*94,90 Nilai*	21.421.208.213,00
18	*0 1*	*2.01*		*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*19 Dokumen*	*1.192.000.000,00*	*APBD*		*19 Dokumen*	*1.250.000.000,00*
18	0 1	2.01	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Kab. Kutai Kartanegara	5 Dokumen	592.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Penyusunan RENJA 2027, RENJA Perubahan 2026, RENJA ZI, dan RENJA RB	4 Dokumen	350.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	50.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran Untuk Paket Pekerjaan Penyusunan Dokumen RKA 2027, RKA Perubahan 2026, DPA 2027 dan DPA Perubahan 2026	4 Dokumen	100.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	50.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran Untuk Paket Pekerjaan Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi(Per Bulan), Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi (Per Triwulan), Laporan Mitigasi Risiko 2027, Laporan Pelaksanaan Mitigasi Risiko 2026 (Per Triwulan), Laporan Maturitas SPIP	5 Laporan	400.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	150.000.000,00	APBD		1 laporan	150.000.000,00
18	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	50.000.000,00	APBD		1 Dokumen	50.000.000,00
18	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup PD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Data	250.000.000,00	APBD	Dilakukan Pengurangan Pagu Anggaran dikarenakan Penyesuaian antara Paket Pekerjaan dan Capaian Output	1 Data	150.000.000,00
18	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1 Berita Acara	50.000.000,00	APBD		1 Berita Acara	50.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Perencanaan Perangkat Daerah							
18	*0 1*	*2.02*		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*100%*	*10.892.789.071,00*	*APBD*		*100%*	*10.615.305.945,00*
18	0 1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	66 orang/ bulan	9.894.305.945,00	APBD		66 orang/ bulan	9.894.305.945,00
18	0 1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	215.000.000,00	APBD		1 Laporan	215.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	7 Dokumen	377.483.126,00	APBD	Dilakukan Pengurangan Pagu Anggaran dikarenakan Penyesuaian antara Paket Pekerjaan dan Capaian Output	2 Dokumen	100.000.000,00
18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	381.000.000,00	APBD		12 Laporan	381.000.000,00
18	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	25.000.000,00	APBD		1 Dokumen	25.000.000,00
18	*01*	*2.03*		*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Persentase dokumen Perencanaan*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*100%*	*337.000.000,00*	*APBD*		*100%*	*337.000.000,00*

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
18	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	25.000.000,00	APBD		2 Dokumen	25.000.000,00
18	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	50.000.000,00	APBD		1 laporan	50.000.000,00
18	01	2.03	04	Rekonsilisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	4 laporan	30.000.000,00	APBD		4 laporan	30.000.000,00
18	01	2.03	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	12 laporan	222.000.000,00	APBD		12 laporan	222.000.000,00
18	02	2.03	06	Pemanfaaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen hasil Pemanfaaatan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD		1 Dokumen	10.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Barang Milik Daerah SKPD							
18	*01*	*2.04*		*Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*	*Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*100%*	*20.000.000,00*	*APBD*		*100%*	*110.000.000,00*
18	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Laporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD		1 Dokumen	10.000.000,00
18	01	2.04	0002	Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Jumlah Laporan Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	10.000.000,00	APBD		12 Dokumen	100.000.000,00
18	*01*	*2.05*		*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*100%*	*552.000.000,00*	*APBD*		*100%*	*1.562.500.000,00*
18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beseta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	1 Paket	127.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Pakaian Miskat,	3 Paket	562.500.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
										Batik dan Olahraga		
18	01	2.05	06	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	100.000.000,00	APBD		4 Dokumen	100.000.000,00
18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Kutai Kartanegara	15 Orang	75.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Diklat Berdassarkan Tugas dan Fungsi Bid. Sekretariat, Bid. PTSP, dan Bid. PM (Regulasi Perizinan Berusaha harus menyesuaikan dengan beberapa Kementerian)	30 Orang	400.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara	75 Orang	250.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Bimbingan Teknis Exelence Service, Bimtek dan Sertifikasi Barang dan Jasa	150 Orang	500.000.000,00
18	*01*	*2.06*		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*100%*	*1.568.030.791,00*	*APBD*		*100%*	*2.470.000.000,00*
18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1 paket	300.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Penyediaan ATK DPMPTSP dan Penyediaan ATK MPP	2 paket	350.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1 paket	293.079.772,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu anggaran untuk Paket Pekerjaan Makan Minum Rapat DPMPTSP; Paket Pekerjaan Penyediaan Makan Minum Rapat MPP dan Penyediaan Bahan Logistik Kantor DPMPTSP dan Penyediaan Logistik MPP	1 paket	500.000.000,00
18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	2 paket	250.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Penyediaan Cetak dan Pengandaan DPMPTSP dan	2 paket	350.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
										Penyediaan Cetak dan Pengandaan MPP		
18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	20.000.000,00	APBD		12 Dokumen	20.000.000,00
18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	561.935.145,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu anggaran untuk rapat-Rapat Koordinasi DPMPTSP dan MPP sesuai Verifikasi undangan masuk pada Perangkat daerah	12 Laporan	1.000.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinas Pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	500 Dokumen	50.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu anggaran Untuk Paket Pekerjaan Jasa Pihak ketiga penyusunan Arsip Dinamis dikarenakan DPMPTSP tidak mempunyai Arsiparis sesuai dengan Rekomendasi ANDRI	500 Dokumen	250.000.000,00
18	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	93.015.874,00	APBD	Dilakukan Pengurangan Pagu anggaran dikarenakan kegiatan ini tidak direkomendasikan oleh Diskominfo sebagai	12 Dokumen	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
										Penanggungjawab kegiatan PPID		
18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100%	361.000.000,00	APBD		78 Unit	750.000.000,00
18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	20 Unit	361.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu anggaran untuk Paket Kegitan Pengadaan Personal Komputer 10 unit; Printer 10 Unit; RAK Arsip 50 Unit; Mixcer 1 set; Penghancur Kertas 5 Unit ;	78 Unit	750.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
										Kursi Pijat MPP 2 Unit;		
18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan jasa tenaga Pendukung Non PNS	Kab. Kutai Kartanegara	100%	2.805.382.268,00	APBD		100%	2.816.782.268,00
18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	2 Laporan	3.000.000,00	APBD		3 Laporan	3.000.000,00
18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	138.600.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaranan Karena Penambahan Jaringan Internet untuk	12 Laporan	150.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
										penggunaan Aplikasi		
18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	24 Laporan	136.242.000,00	APBD		24 Laporan	136.242.000,00
18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	2.527.540.268,00	APBD		12 Laporan	2.527.540.268,00
18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100%	1.128.620.000,00	APBD		100%	1.509.620.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara	144 Unit	498.620.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan pagu Anggaran Untuk Paket Pekerjaan Pembayaran BBM, Suku Cadang dan Sewa Kendaraan Operasional Lapangan Roda 4 sebanyak 2 Unit.	144 Unit	659.620.000,00
18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara	80 Unit	80.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran Untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan Mesin DPMPTSP dan MPP	60 unit	100.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan gedung laiinya yang dipelihara /direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	3 Unit	550.000.000,00	APBD	Dilakukan Panambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Rehap Rumah Jabatan, DMPTSP dan MPP	4 Unit	750.000.000,00
18	02			Program Pengembangan Iklim Pennanaman Modal	Jumlah Proyek (PMA/PMDN)	Kab. Kutai Kartanegara	*665 Proyek*	2.600.000.000,00	APBD		685 Proyek	3.000.000.000,00
18	*02*	*2.01*		*Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*	*Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*1 Dokumen*	*500.000.000,00*	*APBD*		*2 Dokumen*	*950.000.000,00*
18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Dokumen	-	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian	10 Dokumen	300.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
										Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		
18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar	Kab. Kutai Kartanegara	100 Dokumen	500.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	120 Dokumen	650.000.000,00
18	*02*	*2.02*		*Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*	*Jumlah Kajian Peta Potensi Investasi*	*Kab. Kutai Kartanegara*	*3 Dokumen*	*2.100.000.000,00*	*APBD*		*Dokumen*	*2.050.000.000,00*

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	300.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	650.000.000,00
18	02	2.02	03	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Kab. Kutai Kartanegara	Daerah	-	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	20 Daerah	200.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	02	2.02	04	Penyusunan Peta Ponsi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	1.800.000.000,00	APBD	Dilakukan Pengurangan Pagu Anggaran dikarenakan penyeseuaian Paket Pekerjaan (Penyusunan Peta Ponsi Investasi Kabupaten/ Kota) dengan Capaian Output	3 Dokumen	1.200.000.000,00
18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	Kab. Kutai Kartanegara	*340 Investor*	1.550.000.000,00	APBD		350 Investor	3.200.000.000,00
18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	Kab. Kutai Kartanegara	340 Investor	1.550.000.000,00	APBD		350 Investor	3.200.000.000,00
18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	Kab. Kutai Kartanegara	6 Dokumen	950.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Pelaksanaan	6 Dokumen	2.500.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
										Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota		
18	03	2.01	03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman ModalKewenangan Kabupaten / Kota	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	600.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	2 Dokumen	700.000.000,00
18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM	Kab. Kutai Kartanegara	*92 Nilai*	1.650.000.000,00	APBD		*91,96 Nilai*	1.850.000.000,00
18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin	Kab. Kutai Kartanegara	12500 Izin	1.650.000.000,00	APBD		12.600 Izin	1.850.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	04	2.01	06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan berusaha Berbasis Risiko terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	1200 Kegiatan Usaha	600.000.000,00	APBD		1200 Kegiatan Usaha	600.000.000,00
18	04	2.01	08	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	100 Kegiatan Usaha	450.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	200 Kegiatan Usaha	500.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	04	2.01	07	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perzinan	Kab. Kutai Kartanegara	650 Kegiatan Usaha	600.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	1200 Kegiatan Usaha	750.000.000,00
18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Penaikan /Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Kab. Kutai Kartanegara	30.75%	1.200.000.000,00	APBD		10%	2.300.000.000,00
18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Dearah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian PMA/PMDN	Kab. Kutai Kartanegara	1020 Pelaku usaha/kegiatan usaha	1.200.000.000,00	APBD		1000 Pelaku usaha/Kegiatan Usaha	2.300.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	05	2.01	04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Kutai Kartanegara	100 Kegiatan Usaha	200.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	250 Kegiatan Usaha	500.000.000,00
18	05	2.01	05	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Dilapangan ; serta Dilakukan	Kab. Kutai Kartanegara	400 Pelaku Usaha	600.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	550 Pelaku Usaha	1.000.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha							
18	05	2.01	06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Dilapangan	Dalam Daerah dan Luar Daerah	100 Kegiatan Usaha	400.000.000,00	APBD	Dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Paket Pekerjaan Pengawasan Penanaman Modal	200 Kegiatan Usaha	800.000.000,00
18	06			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	PersentaseTersediany a data dan informasi Perizinan Berusaha Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara	*3 Aplikasi*	1.929.882.900,00	APBD	Prensentase	100%	850.000.000,00
18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PersentaseTersediany a data dan informasi Perizinan Berusaha Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara	3 Aplikasi	1.929.882.900,00	APBD		100%	850.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	06	2.01	01	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintgrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Kutai Kartanegara	10 Dokumen	1.929.882.900,00	APBD	Dilakukan Penurunan Pagu Anggaran karena telah disesuaikan Paket pekerjaan denagn Capaian Output	10 Dokumen	850.000.000,00

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya, yang merupakan dokumen yang akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, diharapkan dapat menunjang pencapaian visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara

“ Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berbahagia ”

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Rencana kerja Tahun 2025 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara ini berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dimana seluruh

program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun Anggaran 2025.

Demikian Rencana Kerja ini disusun dengan harapan dapat dianalisis dan dipertimbangkan dalam R-APBD Tahun Anggaran 2025 mendatang.

ee.RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen rencana awal yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan rancangan awal Renja ini merupakan hasil pembahasan atas usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah, dalam hal ini Renstra 2021-2026.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan system perencanaan pembangunan nasional, yaitu : a) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antar pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan dokumen perencanaan yang meliputi dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Jangka menegah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunanan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah tahunan yang dituangkan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ruang ingkup tugas pokok dan fungsi utamanya di bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup tentunya memerlukan kemampuan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan yang harmonis, baik secara struktural (vertical dan horizontal) maupun hubungan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui sebuah perencanaan yang professional dengan memanfaatkan peluang serta menghindari ancaman yang ada, menggunakan kekuatan yang dimiliki dan mengeliminasi kelemahan yang muncul. Secara operasional perencanaan tersebut dijabarkan dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang disusun setiap tahun. Di dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) diuraikan mengenai evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan perencanaan pada tahun ke depan, visi dan dan misi bagi penyelenggaraan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga memenuhi fungsi pelayanan, pembangunan dan pengaturan. Selain itu juga menguraikan berbagai tujuan, sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan dengan penekanan diberbagai aspek pembangunan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut :

1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang

No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8 Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9 Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

13 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

15 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2025 yakni tersedianya suatu dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran untuk Tahun 2025 yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dapat dijadikan acuan dan pegangan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dan seluruh stakeholder terkait pada tahun 2025 dalam melaksanakan pembangunan urusan lingkungan hidup dan kehutanan secara efektif dan efisien.

Tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2025 di bidang lingkungan hidup dan kehutanan ;
b. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
c. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang lingkungan hidup;
d. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang lingkungan hidup.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan dengan pokok bahasan Serta susunan garis besar penulisan renja ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN LALU
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telahaan terhadap kebijakan nasional dan provinsi
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1. Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
4.2. Uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan
4.3. Penjelasan Tabel rencana Program dan Kegiatan
BAB V PENUTUP
5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan Anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
5.3 Rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan evalusi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menegah daerah, sertatata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengaj daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dan tahun berjalan (2024) juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan capaian Renstra. Pada Tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis Perubahan (renstra) Perubahan 2021-2026. Berikut ini adalah realisasi keuangan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2023:

REALISASI KEUANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KAB.KUTAI KARTANEGARA

Progran Kegiatan Sub kegiatan	Pagu Anggaran	Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi		Persentase Capaian
			UP/GU/LS	Sisa	Persen%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.457.300.084	16.492.981.890	.219.630.198	1.273.351.692	92,28
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	207.615.000	207.615.000	202.598.141	5.016.859	97,58
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	132.380.000	132.380.000	132.068.568	311.432	99,76

Daerah					
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.235.000	75.235.000	70.529.573	4.705.427	93,75
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.593.015.412	11.041.303.536	10.204.542.702	836.760.834	96,33
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.442.415.412	10.890.703.536	10.054.957.702	835.745.834	92,33
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	150.600.000	150.600.000	149.585.000	1.015.000	99,33
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	48.800.000	48.800.000	47.239.800	1.560.200	96,80
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	48.800.000	48.800.000	47.239.800	1.560.200	96,80
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	209.000.000	190.416.000	18.584.000	91,11
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.000.000	25.000.000	19.250.000	5.750.000	77,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		184.000.000	171.166.000	12.834.000	93,03
Administrasi Umum Perangkat Daerah	579.624.650	930.802.250	868.103.313	62.698.937	93,26

Progran Kegitan Sub kegiatan	Pagu Anggaran	Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi		Persentase Capaian
			UP/GU/LS	Sisa	Persen%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		321.538.000	311.208.623	10.329.377	96,79
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	500.000.000	1.480.247.395	1.277.488.085	202.759.310	86,30
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	500.000.000	700.000.000	562.797.794	137.202.206	80,40

Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	500.000.000	700.000.000	562.797.794	137.202.206	80,40
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	580.247.395	780.247.395	714.690.291	65.557.104	91,60
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	580.247.395	780.247.395	714.690.291	65.557.104	91,60
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.420.000.000	4.010.276.000	3.564.035.378	446.240.622	88,87
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.511.000.000	1.726.000.000	1.517.662.450	208.337.550	87,93
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	415.000.000	565.000.000	475.865.826	89.134.174	84,22
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	350.000.000	350.000.000	277.808.563	72.191.437	79,37
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	746.000.000	811.000.000	763.988.061	47.011.939	94,20

Progran Kegitan Sub kegiatan	Pagu Anggaran	Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi		Persentase Capaian
			UP/GU/LS	Sisa	Persen%
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000	180.582.000	19.418.000	90,29
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	50.000.000	50.000.000	34.174.000	15.826.000	68,35
Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	75.000.000	75.000.000	74.015.000	985.000	98,69
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	75.000.000	75.000.000	72.393.000	2.607.000	96,52
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	709.000.000	2.084.276.000	1.865.790.928	218.485.072	89,52
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	100.000.000	100.000.000	86.330.687	13.669.313	86,33
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	100.000.000	100.000.000	97.963.000	2.037.000	97,96
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	359.000.000	484.000.000	452.618.891	31.381.109	93,52
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	150.000.000	1.400.276.000	1.228.878.350	171.397.650	87,76
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.360.000.000	5.377.021.730	2.916.728.939	2.460.292.791	54,24
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3.360.000.000	5.377.021.730	2.916.728.939	2.460.292.791	54,24

Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	185.000.000	185.000.000	24.692.000	160.308.000	13,35
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	400.000.000	982.800.000	602.495.000	380.305.000	61,30

Progran Kegitan Sub kegiatan	Pagu Anggaran	Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi		Persentase Capaian
			UP/GU/LS	Sisa	Persen%
Pengelolaan Kebun Raya	500.000.000	178.777.730	7.830.000	170.947.730	4,38
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	640.000.000	3.005.444.000	1.625.020.939	1.380.423.061	54,07
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	775.000.000	1.025.000.000	656.691.000	368.309.000	64,07
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	285.000.000	285.000.000	255.095.720	29.904.280	89,51
Penyimpanan Sementara Limbah B3	100.000.000	75.000.000	59.460.000	15.540.000	79,28
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	25.000.000	-	-	-	-
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	75.000.000	75.000.000	59.460.000	15.540.000	79,28
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	185.000.000	210.000.000	195.635.720	14.364.280	93,16

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	185.000.000	210.000.000	195.635.720	14.364.280	93,16
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN	600.000.000	520.000.000	476.927.668	43.072.332	91,72

Progran Kegitan Sub kegiatan	Pagu Anggaran	Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi		Persentase Capaian
			UP/GU/LS	Sisa	Persen%
DAN PENGELOLAAN LINGKUN					
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pe	600.000.000	520.000.000	476.927.668	43.072.332	91,72
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	100.000.000	-	-	-	-
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	119.000.000	189.000.000	179.595.000	9.405.000	95,02
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	200.000.000	199.125.000	875.000	99,56
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	81.000.000	131.000.000	98.207.668	32.792.332	74,97

PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN	75.000.000	75.000.000	56.395.000	18.605.000	75,19
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	40.000.000	40.000.000	27.380.000	12.620.000	68,45
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	40.000.000	40.000.000	27.380.000	12.620.000	68,45
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	**35.000.000**	**35.000.000**	**29.015.000**	**5.985.000**	**82,90**
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	35.000.000	35.000.000	29.015.000	5.985.000	82,90
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**260.000.000**	**590.000.000**	**494.701.291**	**95.298.709**	**83,85**
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Da	**260.000.000**	**590.000.000**	**494.701.291**	**95.298.709**	**83,85**

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	80.000.000	110.000.000	56.805.000	53.195.000	51,64
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	80.000.000	424.800.000	387.645.021	37.154.979	91,25
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	100.000.000	55.200.000	50.251.270	4.948.730	91,03
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**305.000.000**	**4.491.000.000**	**4.112.421.500**	**378.578.500**	**91,57**
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**305.000.000**	**4.491.000.000**	**4.112.421.500**	**378.578.500**	**91,57**
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	305.000.000	4.491.000.000	4.112.421.500	378.578.500	91,57
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	**200.000.000**	**150.000.000**	**109.452.237**	**40.547.763**	**72,97**
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**200.000.000**	**150.000.000**	**109.452.237**	**40.547.763**	**72,97**
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	60.425.000	39.575.000	60,43
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui	100.000.000	50.000.000	49.027.237	972.763	98,05

Pengadilan					
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**12.764.000.000**	**45.514.099.142**	**41.712.715.961**	**3.801.383.181**	**91,65**
PengeloaanSampah dan Limbah B3	**12.764.000.000**	**45.514.099.142**	**41.712.715.961**	**3.801.383.181**	**91,65**
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	360.000.000	360.000.000	173.105.000	186.895.000	48,08
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	740.000.000	14.973.131.577	14.081.748.455	891.383.122	94,05
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	950.000.000	2.450.000.000	2.114.528.773	335.471.227	86,31
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	400.000.000	400.000.000	277.903.910	122.096.090	69,48
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	2.865.000.000	2.865.000.000	2.510.342.090	354.657.910	87,62
Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	185.000.000	185.000.000	162.722.000	22.278.000	87,96
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6.570.000.000	24.280.967.565	22.392.365.733	1.888.601.832	92,22
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI	**150.000.000**	**67.200.000**	**51.284.223**	**15.915.777**	**76,32**

DAN EKOSISTEMNYA					
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	**150.000.000**	**67.200.000**	**51.284.223**	**15.915.777**	**76,32**
Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	150.000.000	67.200.000	51.284.223	15.915.777	76,32
	34.376.300.084	**79.052.826.157**	**70.246.876.200**	**8.805.949.957**	**88,86**

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target

Terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
2. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
3. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target

Adapun beberapa program dan kegiatan yang memenuhi target diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
6. Program Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait dengan PPLH;
7. Program Peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;

8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
9. Program Pengelolaan Persampahan.

2.1.3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapaianya beberapa program/kegiatan/sub kegiatan antara lain :

1. Beberapa kegiatan terkait dengan rehabilitasi pemakaman bukan berada di kewenangan DLHK dan tidak dilakukan pemindahan anggaran Pokir oleh pemilik usulan.
2. Perencanaan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan;
3. Target yang terlalu tinggi yang tidak dapat dikendalikan;
4. Proses penetapan TAHURA yang memakan waktu lama, terkait administrasi dan penebitan SK penetapan di TAHURA.

2.1.4 Implikasi yang timbul terhadap target capaian programRenstra perangkat Daerah

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra perangkat Daerah merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian program Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya;
2. Bagi program/ kegiatan yang tercapainya target berimplikasi kepada:
    a. menurunnya tingkat pencemaran lingkungan hidup baik pencemaran udara, air maupun lahan;
    b. Semakin banyak pelaku usaha yang tertib terhadap perturan perundang/undangan lingkungan hidup, terlihat dari PROPER
    c. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah;
    d. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel TC.29 sebagaimana terlampir.

TABEL TC 29 REALISASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PADA TAHUN BERJALAN (2024)

No	Sasaram/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Terget Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2023			Perkiraan realisasi capaian target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2024	
					Target Renja-PD tahun 2023	Realisasi Renja-PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi %	Target Program, kegiatan dan Realisasi capaian sub kegiatan s/d tahun berjalan Semester 1 (tahun 2024)	Tingkat capaia Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUAPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63,56 Nilai	58,99 Nilai	60,53	89,8	148	60,53	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evlauasi Kinerja Perangkat Daearh	11 Dokumen	11	11	11	100	8	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6	2	2	100	0	70
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5	5	4	80	2	76

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12 Laporan		12	12	100	12	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1260 Orang/Bulan	1176 Orang/Bulan	1232	1040	84,42	810	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	13 Laporan	14	14	100	1	67
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	2 Laporan		2	2	100	2	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	13 Laporan	12	11	91,66	8	45
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen		3	3	100	3	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Stell	-	-	-	-	0	40
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Laporan	3 Laporan	2	2	100	0	40
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Orang		19	19	100	0	40

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**		**1**	**1**	**100**	**1**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Jenis	33 Paket	2	2	100	0	24
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	-	-	-		0	20
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.17 Jenis 2.150 Kotak 3.80 Kotak	27 Paket 100 Paket 77 Paket	13	6	46,15	0	20
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1. 3 jenis 2. 5.000 Lembar	6 Paket 19,902 Paket	2	1	50	0	20
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	528 Exampler	-	4	4	100	-	0
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan	Jenis	Paket	12	6	50	1	40
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Orang	182 Laporan	40	61	152,5	74	40
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12 Paket	3	3	100	0	0
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-				1	26

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	0	25
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**0**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Jumlah jenis 2. Jumlah unit	1. Jumlah jenis 2. Jumlah unit	19 Unit	75	75	100	75	25
	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	unit	-	-	-	0	40

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12 Bulan**	**12 Bukan**	**12**	**12**	**100**	**12**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	70 Rekening	12	12	100	7	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	849 Orang/Bulan	12	12	100	8	70
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**66,5 Persen**		**60**	**60**	**100**	**64.5**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak	1 Unit	23 Unit	8	11	137,5	1	70
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	unit	20 Unit	18	9	50	0	40

	Lainnya	yang dipelihara							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Unit	1 Gedung	2	2	100	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	uni	1 Unit	-	-	-	0	0
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun**	**100 Persen**	**persen**	**60**	**100**	**166**	**60**	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**Tersusunnya RPPLH**	**4 Dokumen**	**dokumen**	**1**	**1**	**100**	**4**	
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	3	3	100	1	85
	Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	**Terselenggaranya KLHS**	**1 Dokumen**		**1**	**1**	**100**	**1**	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	1. Jumlah Dokumen 2. Jumlah data	1 Dokumen	-	2	2	100	0	90
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi**	**200000 Pohon**	**Pohon**	**2000**	**235106**	**117,53**	**200000**	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**4**	**4**	**100**	**4**	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara,	2 Dokumen	4 Dokumen	2	2	100	0	43

	terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	dan Laut							
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	0	45
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen	10 Dokumen	1	1	100	o	55
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**1 Lpaoran**	**Laporan**	**1**	**1**	**100**	**1**	
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	1 Laporan		1	1	100	0	37
	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lahan terkontaminasi yang diisolasi	5 Lokasi	2 Lokasi	25	34	136	9	45
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	50 Lokasi	2 titik	50	43	86	0	48

	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**1 dokumen**	**Dokumen**	**1**	**5**	**500**	**1**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	1 Dokumen	-	1	1	100	0	0
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	1 Dokumen	-	1	1	100	0	0

	Remediasi	Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi							
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen 235.106 Pohon	2	2	100	0	65
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1 Dokumen	-	1	1	100	0	30
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**Persentase pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luas perkotaan**	**20 Persen**		**20**	**20**	**100**	**20**	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragama hayati Kabupaten Kota**	**24,19 Pesen**		**2**	**0**	**0**	**25.80**	
		Tercapainya penanaman dan pemeliharan pengelolaan keanekaragaman hayati	**Dokumen**					**2**	
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen rencana induk pengelolaan Kehati yang disusun	Dokumen	1 Dokumen	2	0	0	0	0
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati yang dikelola diluar kawasan Hutan	13 Hektar	6 Hektar	317.5	18	5,67	27	36
	pengelolaan kebun raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Hektar		10	0	0	0	10
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan	25 Hektar	44,36 Hektar	329	10	3,03	7	50
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	-		17	12	70,59	0	0

	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**Jumlah Dokumen Kajian timbulan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara**	**3 Dokumen**		**4**	**4**	**100**	**4**	
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	**Jumlah pelaku usaha**	**50 Pelaku Usaha**		**50**	**50**	**100**	**50**	
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	50 Laporan	63 Laporan	4	4	100	19	55
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pelaku Usaha pengumpul limbah B3**	**50 Pelaku Usaha**	**Pelaku Usaha**	**50**	**0**	**0**	**50**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	40 Laporan	1 Dokumen	4	4	100	2	43

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	**Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah**	**19,32 Persen**	**Persen**	**19,32**	**19,32**	**100**	**19.32**	

	HIDUP (PPLH)	**Daerah Kabupaten**							
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase jumlah pembinaan/pengawasan yang dilakukan terhadap jumah izin usaha yang diterbitkan**	**20 Persen**	**Persen**	**20**	**100**	**500**	**20**	
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi fungsional PPLHD	9 Orang		9	9	100	10	50
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	120 Laporan	119 Lporan	120	120	100	67	80
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	20 Dokumen	18 Dokumen	20	28	100	0	0
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	120 Dokumen	0	0	0	0	0	1
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	**Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota**	**75 Persen**	**Persen**	**75**	**75**	**100**	**75**	
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional	**Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH**	**70 Persen**	**Persen**	**75**	**100**	**133,33**	**75**	

	dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	**yang berada di Kabupaten /Kota**							
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	5 Dokumen	13 Dokumen	6	5	83,3	0	25
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	**Persentse peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat**	**70 Persen**	**Persen**	**70**	**100**	**142,8**	**70**	
	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	1 Dokumen	8 Dokumen	1	1	100	1	75
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan pendidikan/pelatihan/penyuluhan**	**35 Lembaga**	**Lembaga**	**35**	**35**	**100**	**35**	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah diklat dan penyuluhan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota**	**35 kali**	**Kali**	**35**	**35**	**100**	**35**	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan	**2 Lembaga**	-	2	2	100	0	35

	Lembaga Kemasyarakatan	Kompetensinya Terkait PPLH							
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	**53 Dokumen**	35 Dokumen	53	53	100	17	63
	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	**325 Orang**	-	200	241	120,5	0	26

	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**1. Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama**	**5 Desa/Kelurahan**	**Desa/Kelurahan**	**5**	**21**	**420**	**5**	
		2. Jumlah Penghargaan Yang Diberikan	**129 Penghargaan**	**Penghargaan**	**126**	**126**	**100**	**109**	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Jenis Penghargaan yang diberikan kepada Masyarakat/Dunia Usaha/Lembaga Lainnya**	**2 jenis**	**Jenis**	**2**	**5**	**250**	**2**	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	124 Entitas	3 entitas	178	178	100	92	60
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi**	**98 Persen**	**Persen**	**96**	**96**	**96**	**96**	

		usaha dan dampaknya di Daerah Kabuapten/Kota yang ditangani							
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan Pengaduan masyarakt di Bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti**	**50 Laporan**	**Laporan**	**50**	**49**	**9,8**	**50**	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	26 aDokumen	25	28	112	25	71
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	20 Dokumen	22 Dokumen	25	18	72	18	65
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**1. Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun**	**1 Lokasi**	**Lokasi**	**2**	**2**	**100**	**2**	
		2. Timbulan sampah	**99,52 Persen**	**Persen**	**94.84**	**94.84**	**100**	**94.84**	
	Pengelolaan Sampah	**1. Persentase Jumlah sampah yang ditangani**	**70 Persen**	**Persen**	**50**	**50**	**100**	**73**	
		2. Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	**28,30 Pesen**	**Persen**	**72**	**72**	**100**	**10.91**	
		3. Persentase cakupan area pelayanan	**72,22 Persen**	**Persen**	**21**	**21**	**100**	**50**	
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kebijakan dan strategi daerah pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan	3 Dokumen	4 Dokumen	3	3	100	5	5

		ditetapkan							
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah laporan hasil Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 Laporan	11 Laporan	4	4	100	0	0
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	60529,994 Ton	98.224 Ton	60.329,41	78.939,10	130,85	0	0,00
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	5 Kelompok	-	5	5	100	0	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	2 Dokumen	-	5	5	100	0	0
	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2 Dokumen	-	3	3	100	0	0
	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	19 Unit	92 unit					

	Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir			3.749	3.748	100	0	0
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	**Persentase Penyelesaian Perencanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)**	**0 Dokumen 1 Kegiatan**	**Persen**	**16,67**	**16,67**	**100**	**16.67**	
	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	**Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura**	**Dokumen**	**Dokumen**	**1**	**0**	**0**	**1**	
	Penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok TAHURA	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Dokumen	2 Dokumen	1	1	100	0	0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbukan atas kinerja pelayanan tersebut untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan program dan kegaitan seuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Adapun hasil analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel TC 30 berikut:

IKU	SATUAN	TARGET			REALISASI		
		2022	2023	2024	2022	2023	Semester 1 2024
Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	57.32	57,42	57.52	53.08	50,53	50,53
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	88.78	88,89	88.89	88.78	91,53	91,53
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	71.38	72,49	73.89	71.38	74,62	74,62
Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	CO2 EQ	18.640	19640	19.531	18640,78	22940	22.940

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi perangkat daerah

Lingkungan hidup merupakan semua hal yang berada di sekitar kehidupan manusia yang keberadaannya secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup yang serasi sangat kita perlukan karena merupakan unsur penentu kehidupan suatu bangsa. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungna hidup untuk

dimanfaatkan dalam memenuhi kepentingan bersama bagi generasi saat ini dan akan datang. Dengan demikian, setia pemanfaatan lingkungan hidup harus bertujuan :

a. Tercapaianya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidupnya;
b. Terwujudnya manusia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup;
c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
d. Tercapaianya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

Apabila setiap pemanfaatan lingkungan hidup dapat mengacu kepada lima hal di atas maka lingkungan hidup akan selalu terjaga dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Meningkatnya jumlah penduduk yang sangat cepat, menyebabkan peningkatan berbagai kebutuhan hidup, mulai dari pangan, sandang dan papan serta permukiman. Disamping itu, kebutuhan sumber daya alam lainnya seperti tanah, air, energi, mineral dan lainnya dieksploitasi dari persediaan sumber daya alam di bumi.

Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan untuk kepentngan manusia menyebabkan semakin menipisnya sumber daya alam dan berbagai permasalahan lingkungan seperti perusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan yang di hadapi akibat pembangunan menyebabkan kualitas lingkungan yang semakin menurun di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Isu-isu lingkugnan tersebut terutama berkaitan dengan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan, pengarusutamaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development)* bagi seluruh sektor yang ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, salah satu hal penting yang

harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan lingkungan tersebut adalah sejauhmana diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik (*Good Environemntal Governance*), maknanya secara ringkas adalah bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang menjamin adanya kesadaran dan komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara adil, bijaksana, efisien,efektif, aspiratif dan responsif yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*, konkretnya adalah bahwa setiap rencana, program, dan proyek pembangunan senantiasa memasukkan pertimbangan-pertimbangan pelestarian fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Permasalahan lingkungan cukup rumit dan berdimensi luas seyogyanya menjadi isu prioritas suatu daerah dan perlu intervensi mengatasi permasalah tersebut karena menyangkut lintas ruang/wilayah, lintas pelaku/sektor, dan lintas generasi dimana dampaknya tidak mengenal batas ruang/wilayah, diakibatkan oleh multi sektor/multi pelaku dan permasalahan lingkungan ini dapat dirasakan akibatnya antar generasi.

Dalam penetuan isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara, terlebih dahulu dilakukan identifikasi isu-isu utama lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil metaplan, teridentifikasi tiga belas (13) isu utama permasalahan lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain :

1. Eksploitasi sumber daya batubara secara terbuka (*open pit*) secara besar- besaran yang berakibat pada tingginya tingkat degradasi lahan.
2. Tingginya tingkat sedimentasi di kawasan tiga danau yaitu Danau Jempang, Danau Semayang dan Danau Melintang.
3. Semakin rusaknya habitat di kawasan Delta Mahakam akibat sedimentasi dan abrasi.
4. Masih kurangnya kesadaran dan belum sebandingnya ketersediaan SDM serta sarana dan prasarana dalam meberikan layanan kebersihan dbandingkan dengan timbulan sampah.
5. Fenomena iklim yang tidak menetu akibat terjadinya perubahan iklim secara global.
6. Tingginya tingkat pencemaran sungai Mahakam dan anak-anak

sungainya sehingga sulit untuk memenuhi baku mutu.

7. Belum adanya kajian teknis terkait ketersediaan air menyambut penetapan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Ibukota Negara bersama dengan Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU).
8. Tingginya tingkat okupasi lahan di wilayah Ibukota Negara khususnya dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya dengan menerapkan program 3 R (*reuse, reduce, dan recycle*).
10. Semakin berkurangnya potensi pemanfaatan jasa lingkungan akibat perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan.
11. Tingginya tingkat kebakaran hutan akibat kemarau yang berkepanjangan.
12. Semakin rusaknya habitat beberapa satwa endemik yang berpotensi terhadap semakin berkurangnya keanekaragaman hayati.
13. Potensi longsor disepanjang sempadan sungai Mahakam dan anak-anak sungainya cukup tinggi.

Isu-isu strategis permasalahan lingkungan seperti tersebut di atas perlu adanya intervensi agar tidak menimbulkan permasaahan lain yang lebih besar dan berdampak luas bagi lingkungan dan masyarakat. Namun demikian, mengingat keterbatasan tenaga, waktu dan biaya maka permasalahan-permasalahan tersebut tidak dapat ditanggulangi secara bersama-sama sehingga perlu ditetapkan isu prioritas dalam penanganan permasalahan lingkungan tersebut. Isu strategis adalah isu yang sangat urgen dan mendesak untuk diintervensi dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. Disebut sebagai isu prioritas atau isu strategis karena apabila tidak diantisipasi dan diperbaiki akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Penetapan isu prioritas atau isu strategis lingkungan hidup difokuskan pada permasalahan terkait lingkungan hidup yang telah, sedang dan/atau akan terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penentuan isu prioritas/strategis ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah. (*sumber : Dokumen DIKPLHD DLHK Kab Kukar*)

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2025

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabuapaten Kutai Kartanegara merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) pada Tahun 2025 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yang berisi Program dan kegiatan sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan , tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada Tahun 2025, Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara terjadi perubahan Nomenklatur Program dan Kegiatan menyesuikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2025 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada rancangan rencana kerja Tahun 2025 akan di sinkronisasi dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga menjadi rumusan program dan kegiatan yang definitif untuk dijadikan rencana kerja Tahun 2025.

Berkut ini adalah tabel review rancangan awal Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

TABEL TC 31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

Rancangan Awal RKPD/Renstra PD							Hasil Analisis Kebutuhan								
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu	Selisih (-/+)	Program/Kegiatan	Pagu Ranhir	Catatan Penting
1	2	7	3		4	5	6	7	8		9	10		6		11
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUAPATEN/KOTA	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	61,9	Nilai	14.605.680.979	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUAPATEN/KOTA	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	61,9	Nilai	35.695.600.930,00	21.089.919.951	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUAPATEN/KOTA	28.884.695.142,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evlauasi Kinerja Perangkat Daearh	11	Dokumen	358.650.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evlauasi Kinerja Perangkat Daearh	11	Dokumen	593.480.000,00	234.830.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000.000,00	
														PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	50.000.000,00	

														PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	250.000.000,00	
														PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	50.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	72.550.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	307.380.000,00	234.830.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	450.000.000,00	Disesuaikan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, dan penambahan untuk perubahan Renstra OPD Tahun 2025-2029 (Menggunaka

																n Tenaga ahli)
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	286.100.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Dokumen	286.100.000,00	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12	Laporan	11.797.031.257	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12	Laporan	17.212.065.972,00	5.415.034.715,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.346.809.296,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	12	Orang /Bulan	11.592.031.257	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	12	Orang/ Bulan	17.007.065.972,00	5.415.034.715,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.091.809.296,00	Disesuaikan dengan pagu Gaji tahun 2024, Penambahan ASN

		me	Tunjangan ASN					Sukarame	Tunjangan ASN							peralihan dari Perkim sebanyak 33 Orang , Proses Rekon Gaji dilakukan di pertengahan tahun
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	Laporan	205.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana	16	Laporan	205.000.000,00	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	205.000.000,00	Laporan rekonsiliasi adalah kertas kerja laporan triwulan, semester dan Tahunan, tidak ada perubahan dengan rancangan awal (cek range pagu hinorraoum di ssh)

									n/Semesteran SKPD							
														Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	25.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	2	Laporan	48.900.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	2	Laporan	48.900.000,00	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	115.000.000,00	
														Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000,00	
														Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000,00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan	Kutai Kartanegara,	Jumlah Laporan Rekonsili	7	Laporan	48.900.000	Rekonsiliasi dan	Kutai Kartane	Jumlah Laporan Rekonsili	7	Laporan	48.900.000,00	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan	30.000.000,00	Laporan Rekonsiliasi dan

	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong, Sukarame	asi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	gara, Tenggarong, Sukarame	asi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah tidak ada perubahan dengan rancangan awal
														Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					-						-			20.000.000,00	
														Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daera	10.000.000,00	
														Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.000.000,00	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	3	Dokumen	50.550.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	3	Dokumen	998.341.400,00	947.791.400,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.550.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	0	Stell	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	380	Stell	446.629.400,00	446.629.400,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	Pengadaan pakain Miskat, Pdl, Korpri, Pakaian Pejuang, Pakaian pramuka, Pakaian tradisioanal Erau
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	Dokumen	50.550.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	Dokumen	151.712.000,00	101.162.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50.550.000,00	Penambahan pagu untuk pembuatan Id Card ASN, THL, dan PHL
	Pendidikan	Kutai Kar	Jumlah ASN	0	Orang	-	Pendidikan dan	Kutai	Jumlah Pegawai	20	Orang	400.000.000	400.000.0	Pendidikan dan	150.000.0	Tindak lanjut dari perjanjian kinerja Esselon II butir ke 14 "Melaksanakan

	dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	tan egara, Tenggarong, Sukarame	yang mengikuti diklat				Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			,00	00,00	Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	00,00	Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;"
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Dokumen	429.180.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dokumen	1.826.600.000,00	1.397.420.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.368.763.258,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35	Paket	81.909.645	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35	Paket	200.000.000,00	118.090.355,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	Bertambahnya beban kerja menjadikan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor berupa Alat Tulis Kantor semakin meningkat
		Kutai	Jumlah					Kutai	Jumlah							Pengadaan Perlengkapan Pantry Gelas minum tamu,

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kartan egara, Tenggarong, Sukarame	Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	0	Jenis	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	Gelas, Teko, piring untuk fasilitas kegiatan rapat dalam rangka pembatasan penggunaan sampah kertas dan plastik
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kutai Kartan egara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.172.150 3.80	Paket	28.013.258	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.172.150 3.80	Paket	35.000.000,00	6.986.742,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.013.258,00	Penambahan pagu Bahan Logistik Kantor di karena adanya peningkatan kebutuhan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kutai Kartan egara, Tenggarong, Sukara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.32.5.000	Paket	8.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.32.5.000	Paket	50.850.000,00	42.850.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00	Penambahan Pagu untuk Peningkatan Kwalitas Cetakan Map berwarna , untuk Penggandaan SK PHL per triwulan dan Cetak Baliho Untuk Event

		me													
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	528	Eksemplar	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan			-	(3.000.000,00)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Tidak di laksanakan karena sudah tidak berlangganan dan pagu akan di alihkan ke sub kegiatan sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor
	Penyediaan Bahan/Material	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan	0	Jenis	-	Penyediaan Bahan/Material	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	Paket	150.750.000,00	150.750.000,00	Penyediaan Bahan/Material	150.750.000,00	Untuk Mendanai Kegiatan Pameran Merah Putih, Pameran Erau, Pameran Pelaksanaan Lingkungan Tingkat Kabupaten dan Nasional
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Kutai Kartanegar	Jumlah Laporan Penyelenggar	85	Laporan	308.257.097	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Kutai Kartanegara,	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	178	laporan	910.000.000,00	601.742.903,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	500.000.000,00	Hasil Evaluasi Anggaran tahun 2023, kebutuhan biaya perjalanan dinas rapat koordinasi tidak mencukupi dengan adanya undangan rapat , rakor ,

	dan Konsultasi SKPD	a, Tenggarong, Sukarame	aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				dan Konsultasi SKPD	Tenggarong, Sukarame	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					dan Konsultasi SKPD		penilaian Adipura, dsb nya yang di laksanakan di dalam dan di luar provinsi , Perjalanan Dinas Dalam Kota , Perjalanan Dinas Biasa, Makan Minum Rapat, di tambah dengan jumlah ASN pelimpahan
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	0	Berkas	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6	Berkas	200.000.000,00	200.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200.000.000,00	Untuk Mendukung Pengelolaan Arsip Dinamis (Pihak Ke 3 Penataan Arsip dinamis),
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	-	Dokumen	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	1	Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	250.000.000,00	Pengembangan Website Perangkat Daerah dengan menambah Fiture update data dan pembuatan Aplikasi Pembayaran pengujian Sample pada UPTD Laboratorium, (Penambahan Aplikasi di Bidang 2 Pelaporan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Limbah b3, sampah,

		Sukarame	Elektronik pada SKPD						Elektronik pada SKPD							pencemaran, RTH dan seluruh bid) (Apliksi Bid 1 si doel, bid 4 , Darling, Si lisa sistem informasi Sekolah adiwiyata) TIM

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**0**	**Persen**	**-**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**9.777.157.000,00**	**9.777.157.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**481.316.000,00**	
	Pengadaan Alat Besar	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah unit	0	unit	-	Pengadaan Alat Besar		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				-	Pengadaan Alat Besar		

	Pengadaan Mebel	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Barang Milik Daerah	0	unit	-	Pengadaan Mebel	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	331	unit	2.799.918.000,00	2.799.918.000,00	Pengadaan Mebel	-	Kondisi Meja Kerja, Kursi yang rusak berat dan bertambahnya jumlah ASN yng tidak sebanding di tambah dengan peralihan 33 ASN dari OPD perkim dengan jumlah sarana dan prasarana yang ada
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah jenis Jumlah unit	0	unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	121	unit	1.833.238.000,00	1.833.238.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	481.316.000,00	Pengadaan AC, PC Unit, Printer, CCTV, Laptop (untuk Operator website memory besar) , Pengadaan Mesin rumput, mesin chainsaw, mesin alkon
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	0	unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	57	Unit	2.350.549.000,00	2.350.549.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Pembangunan Parkir motor, kanopi parkir mobil, kantin, gudang, record center Arsip di karena tempat-tempat tersebut belum cukup tersedia (cek dg standar harga dan pagu honorarium)

							Pengadaan Kendaraan Dinas	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlh Unit Kendaraan Dinas	32	unit	2.793.452.000,00	2.793.452.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas	-	1 Unit Kendaraan Dinas Operasional Jabatan Eselon II , 3 Unit Kendaraan Dinas Jabatan Eselon III. 2 Unit Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat). 9 Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) Lapangan untuk PPLH (trail), 17 Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) Lapangan untuk Fungsional Pengendali dampak Lingkungan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12**	**Bulan**	**1.797.039.672**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12**	**Bulan**	**2.779.809.808,00**	**982.770.136,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.877.926.538,00**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12	Laporan	252.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	455.921.224,00	203.921.224,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.037.954,00	Adanya kenaikan tarif dasar listrik dan penambahan pemakaian untuk suplay listrik, Air ,Internet dan TV kabel di bangunan Gedung Perkim yang di alihkan ke DLHK (listrik taman Pintar, monumen Pancasila, taman Kutai Kartanegara, taman ulin, Taman

		Sukarame	Disediakan						yang Disediakan						Tua Himba, Listrik TPA,)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.545.039.672	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2.323.888.584,00	778.848.912,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.377.888.584,00	Penambahan 16 orang tenaga THL pelimpahan dari OPD perkim dan Belanja Pihak Ketiga untuk Cleaning Service
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame**	**Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**64,5**	**Persen**	**124.330.050**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame**	**Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**64,5**	**Persen**	**2.459.246.750,00**	**2.334.916.700,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**6.474.330.050,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang mendapatkan	1	unit	124.330.050	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang			-		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	124.330.050,00	

	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sukarame	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak				Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	-	unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			-	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Penambahan untuk sewa kendaraan dinas operasional sebanyak 5 unit karena 2 kendaraan dinas operasional dalam kondisi Rusak
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-	unit	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit	250.000.000,00	250.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan seperti AC, Komputer dan Printer dan Genset, Pemeliharaan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Kutai Kartaneg	Jumlah Aset Tetap Lainnya	-	Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Kutai Kartanegara,	Jumlah Aset Tetap Lainnya	2	Unit	2.209.246.750,00	2.209.246.750,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	6.100.000.000,00	Pemintaan pagu untuk kebutuhan rehab gedung sekretariat dan ruang rapat dlhk (TERMASUK Lab???),

	Kantor dan Bangunan Lainnya	ara, Tenggaro ng, Sukarame	yang dipelihara				Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong, Sukarame	yang dipelihara				dan Bangunan Lainnya		pak hamid minta rehab bid 4, Rehab Total semua bidang, kpp Catatan Baru Untuk rehab gedung A, dan

	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	**Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame**	**Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun**	**100**	**Persen**	**400.000.000**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame**	**Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun**	**100**	**Persen**	**400.000.000,00**	**-**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**500.000.000,00**	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	**Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame**	**Tersusunnya RPPLH**	**4**	**Dokumen**	**235.000.000**	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota**	**Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame**	**Tersusunnya RPPLH**	**4**	**Dokumen**	**400.000.000,00**	**165.000.000,00**	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota**	**500.000.000,00**	
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH	Kutai Kartaneg	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan	2	Dokumen	235.000.000	Pengendalian Pelaksanaa	Kutai Kartanegara,	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan	3	**Dokumen**	400.000.000,00	165.000.000,00	Pengendalian Pelaksanaa	500.000.000,00	**Untuk Pengendalian RPPLH, DIKPLH dan IKLH 2025**

Kabupaten /Kota	ara, Tenggaro ng, Sukarame	yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				n RPPLH Kabupaten /Kota	Tenggarong, Sukarame	yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota					n RPPLH Kabupaten /Kota		
Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	**Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame**	**Terselenggaranya KLHS**	**0**	**Dokumen**	**165.000.000**	**Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/ Kota**	**Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame**	**Terselenggaranya KLHS**	**0**	**Dokumen**	**-**	**(165.000.000,00)**	**Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**-**	
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Jumlah data	1	Dokumen	165.000.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun	0	Dokumen	-	(165.000.000,00)	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	-	**Penyusunan KLHS telah selesai di laksanakan di tahun 2024, pagu anggaran akan di alihkan ke sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota**
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	**Kab. Kutai Kartanegg**	**Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman**	**200.000**	**Pohon**	**2.425.000.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU**	**Kab.Kutai Kartanegara**	**Jumlah pohon yang ditanam pada program**	**200.0**	**Pohon**	**4.689.000.000,00**	**2.264.000.000,00**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU**	**3.838.000.000,00**	

KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**ara**	**satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi**				**KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**		**penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi**	**00**				**KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**		
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota	**Kab. Kutai Kartanegara**	**Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**4**	**Dok**	**1.631.000.000**	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota**	**Kab.Kutai Kartanegara**	**Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**4**		**3.151.000.000,00**	**1.520.000.000,00**	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**2.270.000.000,00**	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2	Dokumen	425.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2	Dokumen	1.100.000.000,00	675.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	900.000.000,00	**Penambahan untuk perawatan alat pantau kualitas air secara kontinyu dan online (pergantian alat sensor, Honorarium operator dll), Pengeloaan Ipal domestik**

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	Dokumen	370.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	Dokumen	370.000.000,00	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	370.000.000,00	**Tidak ada perubahan**
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1	Dokumen	836.000.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengujian Dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan	1	Dokumen	1.681.000.000,00	845.000.000,00	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	Indikator Menyesuaikan Kemendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 , Penambahan untuk Pemeliharaan alat AAS, Spektrofotometri, Aquadest dan kalibrasi alat serta pengadaan peralatan uji laboratorium untuk penambahan parameter (pengadaan Mikroskop dan Furnace).
Penanggulangan Pencemaran dan/atau	**Kab. Kutai Kart**	**Jumlah laporan Penanggulangan**	**1**	**laporan**	**193.000.000**	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau**	**Kab.Kutai Kartanegara**	**Jumlah laporan Penanggulangan**	**1**	**laporan**	**193.000.000,00**	**-**	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusaka**	**193.000.000,00**	

Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	**anegara**	**Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**				**Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota**		**Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**					**n Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan sosialisasi informasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	1	Laporan	40.000.000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah laporan sosialisasi informasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	1	Laporan	40.000.000,00	-	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	40.000.000,00	Tidak ada perubahan
Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Lokasi Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lahan terkontaminasi yang diisolasi	25	Lokasi	78.000.000	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Lokasi Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lahan terkontaminasi yang diisolasi	25	Lokasi	78.000.000,00	-	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	78.000.000,00	Tidak ada perubahan
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Kab. Kutai Kartaneg	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan	50	Lokasi	75.000.000	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan	50	Titik	75.000.000,00	-	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	75.000.000,00	Tidak ada perubahan

Hidup	ara	Lingkungan Hidup yang Dihentikan				Hidup		Lingkungan Hidup yang Dihentikan					Hidup		

	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Kab. Kutai Kartanegara**	**Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**1**	**Dokumen**	**601.000.000**	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota**	**Kab.Kutai Kartanegara**	**Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**1**	**Dokumen**	**1.345.000.000,00**	**744.000.000,00**	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**1.375.000.000,00**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	1	Dokumen	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	1	Dokumen	750.000.000,00	650.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	750.000.000,00	Penambahan Pagu untuk melakukan Kajian Dokumen Daya Tampung Beban Pencemaran pada 5 lokasi sungai, untuk meningkatkan kwalitas air
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1	Dokumen	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi		-				(100.000.000,00)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi		Tidak Di dapat dijalankan karena kewenangan dari pusat terkait limbah B3

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1	Dokumen	231.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi			(231.000.000,00)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		Sub Kegiatan ini di mutakhirkan dan di pecah menjadi 2 sub kegiatan
							Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Tenggarong Sebrang, Kota Bangun, Sebulu, Muara Kaman, Loa Kulu	Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	1	Kegiatan	75.000.000,00	75.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	75.000.000,00	Penambahan pagu untuk Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitsi
							Pelaksanaan Rehabilitasi	Tenggarong Sebrang, Kota Bangun, Sebulu, Muara Kaman, Loa Kulu	Jumlah Luas daerah Penanaman dan Jumlah Bibit yang ditanam	5	Ha	300.000.000,00	300.000.000,00	Pelaksanaan Rehabilitasi	330.000.000,00	Penambahan untuk pembelian Bibit,Ongkos Tanam,dan Pemeliharaan

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Sungai mangkurawang (tenggarong), Sungai Separi	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1	Dokumen	170.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi		Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi				(170.000.000,00)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi		Sub Kegiatan ini di mutakhirkan dan di pecah menjadi 2 sub kegiatan
							Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	Sungai Mangkurawang	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten /kota yang dilaksanakan	1	Kegiatan	70.000.000,00	70.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	70.000.000,00	Penambahan pagu untu koordimasi ke BWS, BPDAS, P3EKA, DLH Prov, Rakor
							Pelaksanaan Restorasi	Sungai Mangkurawang	luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten /kota yang menjadi kewenangan	2	Ha	150.000.000,00	150.000.000,00	Pelaksanaan Restorasi	150.000.000,00	Pagu Penambahan di butuhkan untuk membersihkan Gulma di sungai mangkurawang Tenggarong karena akses masuk ke dalam sungai sudah tertutup oleh banyak nya gulma dan pohon-

								kabupaten/ kota							
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame**	**Persentase pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luas perkotaan**	**20**	**Persen**	**2.220.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame**	**Persentase pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luas perkotaan**	**20**	**Persen**	**4.225.000.000,00**	**2.005.000.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**4.136.590.000,00**	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	**Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragama hayati Kabupaten Kota Tercapainya penanaman dan pemeliharaan pengelolaan keanekaraga**	**1** **50**	**Dokumen** **Persen**	**2.220.000.000**	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota**	**Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragama hayati Kabupaten Kota Tercapainya penanaman dan pemeliharaan pengelolaan keanekarag**	**1** **50**	**Dokumen** **Persen**	**4.225.000.000,00**	**2.005.000.000,00** **-**	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota**	**4.136.590.000,00**	

			man hayati						**aman hayati**						
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen rencana induk pengelolaan Kehati yang disusun				Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen rencana induk pengelolaan Kehati yang disusun	1	Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	400.000.000,00	Dokumen Rencana Pengelolaan Kehati menjelaskan tentang pengelolaan Kehati di kabupaten Kukar dan dokumen ini sebagai tindak lanjut dokumen Profil kehati di tahun 2020
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Tenggarong, Muara Kaman	Luas Taman Kehati yang dikelola diluar kawasan Hutan	13	Hektar	585.000.000	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Loa Kulu/ Loa Janan / Marang kayu / Muara Badak	Luas Taman Kehati yang dikelola diluar kawasan Hutan	1	unit	585.000.000,00	-	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	585.000.000,00	Tidak Ada perubahan pagu sesuai dengan rancangan awal
	pengelolaan kebun raya	Loa Kulu	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup	2	Hektar	400.000.000	pengelolaan kebun raya	Loa Kul, loa Janan,	Luas Kebun Raya yang Dikelola	1	Dokumen	300.000.000,00	(100.000.000,00)	pengelolaan kebun raya	300.000.000,00	Akan melaksanakan Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Kebun Raya, sisa pagu

			Kewenangan Kabupaten/Kota					Temggarong Seberang	Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota							akan di alihkan Ke Sub Kegiatan Penyusunan
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tenggaron g, Tenggaron g Seberang	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan	25	Hektar	820.000.000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tenggarong, Tenggarong Seberang	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan	25	hektar	2.500.000.000,00	1.680.000.000,00	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.436.590.000,00	Berdasarkan data yang dimiliki bahwa luas RTH Publik, Privat, Taman Bermain dan Hutan Kota termasuk RTH di Pemakaman di Kecamatan Tenggarong seluas 150,140 ha. Untuk Kecamatan Tenggarong Seberang,
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Tengarong, Samboja, Muara Kaman , Kotabangun, Muara Bada	Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	375	Orang	175.000.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Tenggarong,Loa Janan, Tenggarong Seberang, dan Muara Kaman	Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	100	Orang	200.000.000,00	25.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	175.000.000,00	Penentuan Lokasi di sesuaikan dengan kelompok ternak kelulut yang sudah mendapatkan bantuan di tahun2020- 2023, Kegiatan yang akan di laksanakan adalah Peningkatan Kapasitas Peternak madu kelulut, Penambahan pagu di karenakan menyesuaikan dengan materi peningkatan kapasitas

		k, Loa Janan, Muara Wis, Loa Kulu													
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Tenggarong, Samboja, Muara Kaman , Kotabangun, Muara Badak, Loa Janan, Muara Wis, Loa	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	15	Unit	240.000.000	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Loa Kulu/ Loa Janan / Marang kayu / Muara Badak	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	2	Unit	240.000.000,00	-	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	240.000.000,00	Penyesuaian Target capaian dari belanja pupuk, bibit dan sebagainya menjadi rencana pembangunan Gazebo dan Pos kemamanan

		Kulu														

	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Jumlah Dokumen Kajian timbulan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara	4	Dokumen	175.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kajian timbulan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara	4	Dokumen	400.000.000,00	225.000.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	400.000.000,00	
	Penyimpanan Sementara Limbah B3		Jumlah pelaku usaha	50	Pelaku usaha	100.000.000	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah pelaku usaha	50	Pelaku usaha	100.000.000,00	-	Penyimpanan Sementara Limbah B3	100.000.000,00	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan		Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Izin Pengumpulan	50	Dokumen	25.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan		Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpu	-	Dokumen	-	(25.000.000,00)	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara		Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena batas kewenangan, sehingga anggaran dialihkan ke sub Kegiatan Verifikasi Lapangan

	Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		lan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	50	Laporan	75.000.000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan /Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1	Dokumen Laporan Hasil Verifikasi	100.000.000,00	25.000.000,00	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	100.000.000,00	Bahwa Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan tidak hanya pada Permohonan Baru tetapi dilakukan Verifikasi pada Tempat Penyimpanan Limbah B3 yang sudah Beroperasi di dalam wilayah kabupaten Kutai Kartanegara
	Pengumpulan Limbah B3	Kabupat	Jumlah Pelaku	50	Pelaku	75.000.	Pengumpulan Limbah B3	Kabupaten	Jumlah Pelaku	50	Pelak	300.000.000	225.000.0	Pengumpulan Limbah B3	300.000.0	

	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	en Kutai Kartanegara	Usaha pengumpul limbah B3		usaha	000	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Usaha pengumpul limbah B3		u usaha	,00	00,00	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	00,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/	40	Dokumen	75.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi	3	Dokumen	300.000.000,00	225.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	300.000.000,00	Kegiatan Koordinasi dengan Propinsi dan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup) dalam Pengelolaan dan Kebijakan skala Propinsi dan Nasional

			Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3						Kewenangan Pemda Kabupaten/ Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan							
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kabupaten Kutai Kartanegara	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	19,32	Persen	600.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kabupaten Kutai Kartanegara	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	19,32	Persen	600.000.000,00	-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	600.000.000,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha	Kabupaten Kutai	Persentase jumlah pembinaan/pengawasan yang	20	Persen	600.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau	Kabupaten Kutai Karta	Persentase jumlah pembinaan/pengawasan yang	20	Persen	600.000.000,00	-	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau	600.000.000,00	

	dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kartanegara	dilakukan terhadap jumah izin usaha yang diterbitkan				Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	negara	dilakukan terhadap jumah izin usaha yang diterbitkan					Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	120	Dokumen	105.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	120	Dokumen	-	(105.000.000,00)	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Pengurangan anggaran karena hingga saat ini belum dibentuknya lembaga uji, pagu di alihkan ke sub kegiatan
							Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Sulawesi Selatan, Makassar	Jumlah PNS yang dibentuk dandiangkat menjadi Fungsional PPLHD	3	orang	85.000.000,00	85.000.000,00	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	85.000.000,00	Tambahan/pembentukan PPLH dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan, Sesuai Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi fungsional PPLHD	9	Orang	105.000.000	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jakarta	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	9	orang	200.000.000,00	95.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	200.000.000,00	ditambah guna menambah kompetensi PPLH
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	120	Laporan	315.000.000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	75	Badan Usaha	315.000.000,00	-	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan	315.000.000,00	Target Menyesuaikan dengan pemutakhiran Perhitungan Target Ikk Lppd Tahun 2023

							dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						Pengelolaan Lingkungan Hidup		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	20	Dokumen	75.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD			-	(75.000.000,00)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		Dihilangkan karena sudah tidak terdapat Sub Kegiatan ini pada Kepmendagri-No-900.1.15.5 1317-Tahun-2023
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota	75	Persen	75.000.000	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kutai Kartanegara, Tabang, Kenohan, Kota Bangun	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota	75	Persen	75.000.000,00	-	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	75.000.000,00	

	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota	75	Persen	40.000.000	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kutai Kartanegara, Tabang, Kenohan, Kota Bangun	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota	75	Persen	40.000.000,00	-	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	40.000.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan	5	Dokumen	40.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	5	Dokumen	40.000.000,00	-	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	40.000.000,00	Pagu Tidak ada perubahan dari rancangan awal

			PPLH						dan Hak MHA Terkait dengan PPLH						
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentse peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat	70	Persen	35.000.000	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kutai Kartanegara, Tabang, Kenohan, Kota Bangun	Persentse peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat	70	Persen	35.000.000,00	-	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	35.000.000,00	
	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampinga	1	Dokumen	35.000.000	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan,	1	Dokumen	35.000.000,00	-	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	35.000.000,00	Pagu Tidak ada perubahan dari rancangan awal

			n dan penguatan						Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan								

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan pendidikan/ pelatihan/penyuluhan	35	Lembaga	240.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan pendidikan/pelatihan/penyuluhan	35	Lembaga	380.000.000,00	140.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	480.000.000,00	
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah diklat dan penyuluhan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/ kota	35	kali	240.000.000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/K	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah diklat dan penyuluhan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	35	kali	380.000.000,00	140.000.000,00	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	480.000.000,00	

						ota									
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	2	Lembaga	80.000.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	2	Lembaga	80.000.000,00	-	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	80.000.000,00	Pagu Tidak ada perubahan dari rancangan awal
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	30	Dokumen	80.000.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	30	Dokumen	250.000.000,00	170.000.000,00	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	250.000.000,00	Perlunya insentif bagi sekolah yang berprestsi dalam melaksanakan program Gerakan Peduli dan Berbudaya(GPB) LH
Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang	325	Orang	80.000.000	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	300	orang	50.000.000,00	(30.000.000,00)	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	150.000.000,00	dana dialihkan ke Program Gerakan Peduli Lin

		terlibat													
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama 2. Jumlah Penghargaan Yang Diberikan	5 128	Desa/ Kelurahan Penghargaan	100.000.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama 2. Jumlah Penghargaan Yang Diberikan	5 128	Desa/ Kelurahan Penghargaan	3.650.000.000,00	3.550.000.000,00	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.451.125.000,00	
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Jenis Penghargaan yang diberikan kepada Masyarakat/ Dunia Usaha/Lembaga Lainnya	2	Jenis	100.000.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Jenis Penghargaan yang diberikan kepada Masyarakat/Dunia Usaha/Lembaga Lainnya	2	Jenis	3.650.000.000,00	3.550.000.000,00	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.451.125.000,00	
Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga	Kabupaten Kutai	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat	124	Entitas	100.000.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga	Kabupaten Kutai	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia	20128	Desa/Kelurahan	3.650.000.000,00	3.550.000.000,00	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga	2.451.125.000,00	Penambahan dialokasikan untuk membiaya insentif bagi desa/kelurahan

Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Karta negara	/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Karta negara	Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		Penghargaan			Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		yang mendapatkan predikat DESA/KELURAHAN IDAMAN dan tim pembina dan penilai Desa Ramah lingkungan diluar Tim yang ada di DLHK
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabuapten/Kota yang ditangani	97	Persen	100.000.000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabuapten/Kota yang ditangani	97	Persen	250.000.000,00	150.000.000,00	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	250.000.000,00	

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Pengaduan masyarakt di Bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti	50	Laporan	100.000.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Pengaduan masyarakt di Bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	50	Laporan	250.000.000,00	150.000.000,00	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	250.000.000,00	
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten /Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	20	Dokumen	100.000.000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten /Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	20	Pengaduan	20.000.000,00	(80.000.000,00)	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	20.000.000,00	digunakan untuk membangun aplikasi pelaporan pengaduan
						Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	20	Perkara	180.000.000,00	180.000.000,00	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	180.000.000,00	Penambahan Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri-No-900.1.15.5-1317-Tahun- 2023

						Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangankabupaten/kota	10	perkara	50.000.000,00	50.000.000,00	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	50.000.000,00	Penurunan Target capaian kinerja karena terkait kewenangan kabupaten/kota,

	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun 2. Timbulan sampah	1 97.64	Lokasi Persen	11.800.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun 2. Timbulan sampah	1 97.64	Lokasi Persen	134.291.784.121,00	122.491.784.121,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	59.680.905.990,00	
			1. Persentase Jumlah sampah yang ditangani	72	Persen				1. Persentase Jumlah sampah yang ditangani	72	Persen		122.491.784.121,00			
	Pengelolaan Sampah	Kabupaten Kutai Kartanegara	2. Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R 3. Persentase	12,73 61,11	Persen Persen	11.800.000.000	Pengelolaan Sampah	Kabupaten Kutai Kartanegara	2. Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R 3. Persentase cakupan area pelayanan	12,73 61,11	Persen Persen	134.291.784.121,00	- -	Pengelolaan Sampah	59.680.905.990,00	

			cakupan area pelayanan													
	Penyusunan Kebijakan dan Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Strategi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Kebijakan dan strategi daerah pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan	3	Dokumen	280.000.000	Penyusunan Kebijakan dan Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Strategi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Kebijakan dan strategi daerah pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan	4	Dokumen	490.000.000,00	210.000.000,00	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	490.000.000,00	1. Kesesuaian Kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan oleh Pihak Tenaga Ahli, Perbub Pengelolaan sampah dan Laporan Capaian Kebijakan Pengelolan Sampah, Penambahan 1 peraturan bupati
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1	Laporan	720.000.000	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		Tabang, Kota Bangun, Sanga-sanga	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	24	Ton	20.142.883.212,00	19.422.883.212,00	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	14.350.941.690,00	Pembangunan TPS3R dan Sarana Pendukungnya , pembangunan TPS3R belum ada di Tenggarong dan ini sifatnya wajib untuk mendukung Adipura Kabupaten

	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	60529,994	Laporan	1.950.000.000	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	90	Unit	62.158.358.000,00	60.208.358.000,00	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	35.849.464.300,00	Berdasarakan evaluasi tahun 2024 penambahan pagu terdapat penganggaran gaji PHL untuk pemenuhan 19 kecamatan masing2 10 orang per kecamatan, untuk pemenuhan Sapras, (Biaya 20.000.000.000 Pengelolaan sampah di 19 kecamatan)
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam	5	Kelompok	880.000.000	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kutai Kartanegara,	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5	Kelompok	1.500.000.000,00	620.000.000,00	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1.500.000.000,00	Penambahan pagu untuk Melaksanakan event agen lingkungan dan memberikan penghargaan serta menentukan duta sampah,

			kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat													pembuatan dokumenter iklan layanan masyarakat
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai	2	Dokumen	900.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Samboja, anggana, muara kaman tenggarong sebrang, tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	7 (+4)	Dokumen	4.700.000.000,00	3.800.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	3.050.000.000,00	Penambahan lokasi Penyusunan Fs dan Dokumen DED, UKL-UPL pada 7 Kegiatan (Penyusunan FS dan DED TPST PDU samboja, Anggana,muara kaman, tenggarong, penyusunan dokumen UKL-UPL Amdal Kec tenggarong, DED Kec Tenggarong, UKL-UPL amdal TPA Bekotok) (Plus 4 apabila di tahun 2024 tidak dapat di laksanakan ,Sekiranya ada penundaan Pengadaan lahan di DPPR (Kebutuhan tambahan Anggaran

			dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada												3.000.000.000)
	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2	Dokumen	100.000.000	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2	Dokumen	250.000.000,00	150.000.000,00	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	250.000.000,00	Penambahan Anggaran untuk membuat MOU Pengelolaan Sampah DLHK demgan 20 Kecamatan
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan	19	Unit	6.970.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	11990	unit	45.050.542.909,00	38.080.542.909,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	4.190.500.000,00	Penambahan pagu untuk Penambahan peralatan kebersihan , pakaian PHL, landasan bak kontainer, tps 3 warna

			Akhir													

	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Muara Kamam, Muara Siran	Persentase Penyelesaian Perencanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)	16,67	Persen	300.000.000	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Muara Kamam, Muara Siran	Persentase Penyelesaian Perencanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)	16,67	Persen	1.250.000.000,00	950.000.000,00	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1.250.000.000,00	
	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Muara Kamam, Muara Siran	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	1	Dokumen	300.000.000	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Muara Kamam, Muara Siran	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	1	Dokumen	1.250.000.000,00	950.000.000,00	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	1.250.000.000,00	
	Penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok TAHURA	Muara Kamam, Muara Siran	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	0	Dokumen	-	Penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok TAHURA		Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota			350.000.000,00	350.000.000,00	PENGELOLAAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA BESERTA HABITATNYA DI TAHURA KABUPATEN/KOTA	350.000.000,00	Setelah dilakukan penetapan dan penataan batas luar Tahura pada tahun 2024 maka akan dilakukan penyusunan peta blok tahura yang akan membagi tahura menjadi beberapa blok pengelolaan dan pembuatan peta penataan

						Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Muara Kaman, Kota Bangun, Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	2	Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	600.000.000,00	Dokumen pengelolaan tahura baik jangka panjang dan jangka pendek akan memberikan arahan dan kebijakan dalam pengelolaan tahura untuk jangka waktu tertentu sehingga pengelolaan tahura dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
	Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Kabupaten/Kota	Muara Siran	Koordinasi	15	Kali	150.000.000	Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Kabupaten/Kota	Muara Kaman, Kota Bangun, Kembang Janggut	Koordinasi	15	Kali	150.000.000,00	-	Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Kabupaten/Kota	150.000.000,00	Sesuai dengan pagu ranwal tidak ada penambahan
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura Kabupaten/Kota	Muara Siran	Jumlah Peserta	100	Orang	150.000.000	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura Kabupaten/Kota	Muara Kaman, Kota Bangun, Kembang	Jumlah Peserta	100	Orang	150.000.000,00	-	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura Kabupaten/Kota	150.000.000,00	Sesuai dengan pagu ranwal tidak ada penambahan

								Jang gut								
						33.500.680.979,00						185.906.385.051,00	152.865.704.072		102.546.316.132,00	

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Semakin kompleksnya permasalahan di Bidang lingkungan hidup memerlukan berbagai masukan dari berbagai pihak baik dari masyarakat, LSM, Institusi pendidikan dan instansi pemerintah terkait lainnya. Usulan program dan kegiatan masyarakat ini diperoleh dari musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan, dan Forum Perangkat Daerah Daerah yang dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sampai pada saat dokumen ini disusun proses penelahaan usulan masih berlangsung (masyarakat).

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Di dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun pusat. Dalam melaksanakan fungsi- fungsi tersebut maka kegiatan yang akan dilakukan diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun arah pembangunan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020- 2024, yaitu :

1. Memperkuat ekonomi nasional, investasi dan ekspor, melalui langkah- langkah penataan regulasi dan Memperkuat ekonomi nasional, investasi dan ekspor, melalui langkah-langkah penataan regulasi dan dukungan iklim usaha, serta penguatan Tata kelola untuk kepastian hukum;
2. Pengentasan kemiskinan melalui perhutanan sosial, TORA dan pendampingan usaha pada kelompok masyarakat dan kelompok tani hutan mandiri;
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hiduo dan kehutanan melalui Rehabilitasi DAS, perlindungan dan pengawasan kawasan hutan, pengendalian pencemaran, pengelolaan dampah, penegakan hukum, pencegahan dan penanggulanan kebakaran hutan dan lahan serta restorasi lahan gambut;
4. Pembangunan infrastruktur lingkungan dalam mmendukung program prioritas nasional (pengentasan kemiskinan, pengembangan ekowisata);
5. Penguatan pendidikan vokasional dan penguatan program yang menyerap tenaga kerja masyarakat dalam jumlah besar.

Tujuan dan peran utama Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut akan diraih melalui perumusan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :

a. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat;
b. Memanfaatan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hiduo secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
c. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumber daya alam sebagai sistem penyangga

Sejalan dengan hal tersebut pelaksanaan fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabuapten Kutai Kartanegara diharapkan tidak bertolak belakang dengan Strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1. Menjaga Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	1.Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkunan	1. Pengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		2. Optimalisasi Perencanaan Lingkungan Hidup	1. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

		3. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	**3.1.** Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati) di luar kawasan hutan dan Taman Keanekaragaman hayati
		4. Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	**3.2.** Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		5. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	**3.3.** Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
		6. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penilaian dan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
		7.Peningkatan pengelolaan persampahan	Penanganan Sampah darat dan laut
	2. Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup	8. Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		9. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Peningkatan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

			3. Pengelolaan administrasi barang milik daerah 4. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 5. Pengelolaan Administrasi Umum 6. Pengadaan Barang Milik Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pernyataan untuk mendukung visi dan misi Bupati, yaitu " Terwujudnya Kutai Kartanegara yang sejahtera dan bahagia. Pada misi ke 5 yaitu : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan. Adapun tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

Tujuan : "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup"

Berdasarkan tujuan di atas maka disusunlah sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel TC. 25 Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel TC.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	72,82	73.14	73.47	73.81	74.15	74.51	74.51

	Hidup										
2		Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup	Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	CO2EQ	18.212	18.640	19.085	19.531	19.976	20.394	20.394
			Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	57.22	57.32	57.42	57.52	57.62	57.72	57.72
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	88.68	88.78	88.89	88.89	89.09	89.19	89.19
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	70.26	71.38	72.49	73.89	74.88	76.20	76.20

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Dalam mencapai tujuan dan sasarannya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabuptaen Kutai Kartanegara pada Tahun 2025 akan melaksanakan 12 (Dua belas) program dan 74 (Tujuh Puluh Empat) sub kegiatan, dalam Rencana Kerja (Renja 2025) ini kegiatan dilakukan dalam dua urusan yaitu urusan Lingkungan Hidup dan Urusan Kehutanan. Pelaksanaan Program Kegiatan pada Renja 2025 masih Beberapa Usulan Penambahan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Masih akan Melajutkan Progam Prioritas Idaman yang Di Amanah kan pada 4 (Empat) Program, yaitu Program Pengelolaan Sampah Kegiatan Pengelolaan Sampah DAN Program Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan nama PROGRAM KUKAR PERDULI LINGKUNGAN dan PROGRAM DUNIA USAHA RAMAH LINGKUNGAN, Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Usaha dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Pelaksanaan dan Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan nama Program DESA RAMAH LINGKUNGAN dan PROGRAM DUNIA USAHA RAMAH LINGKUNGAN.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Program Penunjang Dedikasi Kukar IDAMAN 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM DEDIKASI	PAGU SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Desa Ramah Lingkungan	75.000.000,00
			Pelaksanaan Rehabilitasi		300.000.000,00
2	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Dunia Usaha Ramah Lingkungan	75.000.000,00
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang - Undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dunia Usaha Ramah Lingkungan	315.000.000,00
4	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Desa Ramah Lingkungan	2.451.125.000,00
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		400.000.000,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan		3.400.000.000,00

			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Kukar Peduli Lingkungan	39.006.709.808,00
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kukar Peduli Lingkungan	380.000.000,00
			Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah		27.749.272.000,00
			Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah		14.300.000.000,00
			Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan		200.000.000,00

4.1.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Adapun Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025 Program, secara besar telah sesuai dengan rancangan awal RKPD , akan tetapi dari segi pagu indikatif tidak sesuai dan mengalami pengurangan pagu secara signifikan yaitu Analisis Kebutuhan Anggaran pada ranwa renja Sebesar Rp225.278.934.157 setelah RPKD Pagu Anggaran menjadi Rp102.546.316.312, mengalami penurunan sebesar Rp122.732.618.025 atau 45,52% , adalah Program Pengelolaan Sampah yang juga pengampu Program Prioritas Kukar Idaman dengan Program Kukar Peduli Lingkungan, yaitu dari analisis pagu ranwal sebesar Rp134.291.784.121 setelah RKPD menjadi Rp59.680.990.000 , atau mengalami pengurangan pagu sebesar 55,56%, akan tetapi untuk Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang lain juga mengalami pengurangan dan penambahan yang tidak signifikan.

Beberapa Sub Kegiatan juga mengalami penambahan baik di bidang Pengendalian Pencermahan dan/atau kerusakan Kerusakan Lingkungan Hidup, serta Urusan Kehuatan bidang Tata lingkungan, semua sub kegiatan tersebut telah disesuaikan dengan Permendagri 90 dan lampiran 050, pelaksanaan kegiatan tersebar di 20 Kecamatan dan 46 kelurahan. Ke Keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun Kegiatan Bidang Sekretariat baik di bidang Program dan di Umum Tatalaksana dan Kepegawaian, mengalami peningkatan pagu dan penambahan Sub Kegiatan Baru yaitu mandatory pada tahun 2025, untuk Mengoptimalkan kegaiatan- kegiatan tersebut bertujuan untuk menambah Output pekerjaan berkaitan dengan upaya perbaikan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih maksimal dalam Program Penunjang Urusan Perintahan Daerah Kabupaten /Kota.

4.1.2. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan Penambahan Sub Kegiatan Baru

Pada Rencana Kerja (Renja) 2025, Terdapat beberapa sub kegiatan baru yang sebelumnya pada Rancangan Awal belum dianggarkan antara lain :

a. PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH, Pagu Rp50.000.000,00 sub Kegiatan mandatory langsung dari OPD bappeda;
b. PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH, Pagu Rp250.000.000,00 sub Kegiatan mandatory langsung dari OPD bappeda;
c. PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH, Pagu Rp50.000.000,00 sub Kegiatan mandatory langsung dari OPD bappeda;
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pagu Rp50.000.000,00 sub Kegiatan mandatory langsung dari OPD bappeda;
e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, Pagu Rp25.000.000,00 sub Kegiatan mandatory langsung dari OPD bappeda;
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Pagu Rp50.000.000,00 sub Kegiatan mandatory langsung dari OPD bappeda;
g. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Pagu Rp25.000.000,00 sub Kegiatan mandatory langsung dari OPD bappeda;
h. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, Pagu Rp50.000.000,00 sub Kegiatan mandatory langsung dari OPD bappeda;
i. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, Pagu Rp10.000.000,00 sub Kegiatan mandatory langsung dari OPD bappeda;
j. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah, Pagu Rp10.000.000,00 sub Kegiatan mandatory langsung dari OPD

bappeda;

k. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah, Pagu Rp10.000.000,00 sub Kegiatan mandatory langsung dari OPD bappeda;

l. Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi, Pemutakhiran yang sebelum nya sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi, pagu Rp75.000.000,00;

m. Pelaksanaan Rehabilitasi Pemutakhiran yang sebelum nya sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi, pagu Rp330.000.000,00;

n. Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi, pemutakhiran dari sub Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi, pagu Rp70.000.000,00; Pelaksanaan Restorasi, pemutakhiran dari sub Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi, pagu Rp150.000.000,00;

o. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, akan di laksanakan kembali di tahun 2025 dengan pagu Rp400.000.000,00 dengan tujuan akan menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan Kehati menjelaskan tentang pengelolaan Kehati di kabupaten Kukar dan dokumen ini sebagai tindak lanjut dokumen Profil kehati di tahun 2020;

p. Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, dengan pagu Rp. 85.000.000,00, Tambahan/pembentukan PPLH dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan, Sesuai Kepmendagri 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023;

q. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, pagu Rp180.000.000,00;

r. Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, pagu Rp50.000.000,00; melanjutkan dari tahun sebelumnya;

s. Pengelolaan Jenis Tumbuhan dan Satwa beserta Habitatnya d Tahura Kabupaten/Kota, Pagu Rp390.000.000,00; Sub kegiatan Pemutakhiran dengan tujuan akan agar dapat mengitung Indeks Kehati di Kabupaten Kutai Kartanegara; dan

t. Perencanaan Pengelolaan TAHURA, Pagu Rp600.000.000,00, Setelah dilakukan penetapan dan penataan batas luar Tahura pada tahun 2024 maka akan dilakukan penyusunan peta blok tahura yang membagi tahura menjadi beberapa blok

pengelolaan dan pembuatan peta penataan wilayah kerja pengelolaan tahura. Penyusunan Dokumen pengelolaan tahura baik jangka panjang dan jangka pendek akan memberikan arahan dan kebijakan dalam pengelolaan tahura untuk jangka waktu tertentu sehingga pengelolaan tahura dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4.1.3. Tabel Rencana Program dan Kegiatan

Adapun rencana program kegiatan, lokasi, pagu anggaran kebutuhan dan sumber pendanaan sebagaimana berikut:

TC 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025

DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Hasil Analisi Kebutuhan									Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUAPATEN/KOTA	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	61,9	Nilai	28.884.695.142,00			61,9	14.606.060.979
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evlauasi Kinerja Perangkat Daearh	11	Dokumen	1.000.000.000,00			11	358.650.000
	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000,00	APBD			
	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	Data	250.000.000,00	APBD			

	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Berita Acara	50.000.000,00	APBD			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	450.000.000,00	APBD	Disesuaikan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, dan penambahan untuk perubahan Renstra OPD Tahun 2025-2029 (Menggunakan Tenaga ahli)	3	72.550.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	3	Laporan	50.000.000,00	APBD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	150.000.000,00	APBD		5	286.100.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12	Laporan	16.346.809.296,00			12	11.797.031.257
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	12	Orang/Bula	16.091.809.296,0	APBD	Disesuaikan dengan pagu Gaji tahun 2024, Penambahan ASN peralihan dari Perkim sebanyak	12	11.592.031.257

	ASN	Sukarame	Tunjangan ASN		n	0		33 Orang , Proses Rekon Gaji dilakukan di pertengahan tahun		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	25.000.000,00	**APBD**			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	Laporan	205.000.000,00	**APBD**	Laporan rekonsiliasi adalah kertas kerja laporan triwulan, semester dan Tahunan, tidak ada perubahan dengan rancangan awal (cek range pagu hinorraoum di ssh)	16	205.000.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	25.000.000,00	**APBD**			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kutai Kartanegara, Tenggarong,**	**Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi**	**2**	**Laporan**	**115.000.000,00**			**2**	**48.980.000**
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong,	**Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**1**	**Dokumen**	25.000.000,00	**APBD**			
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong,	**Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan**	**1**	**Laporan**	50.000.000,00	**APBD**			

			Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik							
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	Laporan	30.000.000,00	**APBD**	Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah tidak ada perubahan dengan rancangan awal	7	48.980.000
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	10.000.000,00	**APBD**			
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					20.000.000,00				-
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daera	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame				10.000.000,00	**APBD**			
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	10.000.000,00	**APBD**			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	3	Dokumen	200.550.000,00			3	50.600.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	0	Stell	-	APBD	Pengadaan pakain Miskat, Pdl, Korpri, Pakaian Pejuang, Pakaian pramuka, Pakaian tradisioanal Erau	380	-
	Pendataan dan Pengolahan	Kutai Kartanegara,	Jumlah Dokumen				APBD	Penambahan pagu untuk		

	Administrasi Kepegawaian	Tenggarong, Sukarame	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	Dokumen	50.550.000,00		pembuatan Id Card ASN, THL, dan PHL	2	50.600.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	0	Orang	150.000.000,00	APBD	Tindak lanjut dari perjanjian kinerja Esselon II butir ke 14 "Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;"	20	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Dokumen	1.368.763.258,00				429.420.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35	Paket	200.000.000	APBD	Bertambahnya beban kerja menjadikan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor berupa Alat Tulis Kantor semakin meningkat	40	81.909.645
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	0	Jenis	-	APBD	Pengadaan Perlengkapan Pantry Gelas minum tamu, Gelas, Teko, piring untuk fasilitas kegiatan rapat dalam rangka pembatasan penggunaan sampah kertas dan plastik	1	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.17 2.150 3.80	Paket	28.013.258,00	APBD	Penambahan pagu Bahan Logistik Kantor di karena adanya peningkatan kebutuhan	1.17 2.150 3.85	28.253.258
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kutai Kartanegara, Tenggarong,	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1. 3 2.	Paket	40.000.000,00	APBD	Penambahan Pagu untuk Peningkatan Kwalitas Cetakan Map berwarna ,	1. 3 2.	8.000.000

		Sukarame	yang Disediakan	5.000				untuk Penggandaan SK PHL per triwulan dan Cetak Baliho Untuk Event	5.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	528	Exemplar	-	APBD	Tidak di laksanakan karena sudah tidak berlangganan dan pagu akan di alihkan ke sub kegiatan sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor		3.000.000
	Penyediaan Bahan/Material	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan	0	Jenis	150.750.000,00	**APBD**	Untuk Mendanai Kegiatan Pameran Merah Putih, Pameran Erau, Pameran Pelaksanaan Lingkungan Tingkat Kabupaten dan Nasional	5	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85	Laporan	500.000.000,00	**APBD**	Hasil Evaluasi Anggaran tahun 2023, kebutuhan biaya perjalanan dinas rapat koordinasi tidak mencukupi dengan adanya undangan rapat , rakor , penilaian Adipura, dsb nya yang di laksanakan di dalam dan di luar provinsi , Perjalanan Dinas Dalam Kota , Perjalanan Dinas Biasa, Makan Minum Rapat, di tambah dengan jumlah ASN	178	308.257.097
		Kutai Kartanegara,	Jumlah Arsip pada Unit				**APBD**	Untuk Mendukung		

	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong, Sukarame	Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	0	Berkas	200.000.000,00		Pengelolaan Arsip Dinamis (Pihak Ke 3 Penataan Arsip dinamis),	6	-
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Dokumen	250.000.000,00	**APBD**	Pengembangan Website Perangkat Daerah dengan menambah Fiture update data dan pembuatan Aplikasi Pembayaran pengujian Sample pada UPTD Laboratorium, (Penambahan Aplikasi di Bidang 2 Pelaporan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Limbah b3, sampah, pencemaran, RTH dan seluruh bid) (Apliksi Bid 1 si doel, bid 4 , Darling, Si lisa sistem informasi Sekolah	1	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**0**	**Persen**	**481.316.000,00**			**100**	**22.651.480**
	Pengadaan Alat Besar	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah unit	0	unit					-
	Pengadaan Mebel	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Barang Milik Daerah	0	unit	-	**APBD**	Kondisi Meja Kerja, Kursi yang rusak berat dan bertambahnya jumlah ASN yng tidak sebanding di tambah dengan peralihan 33	331	-

								ASN dari OPD perkim dengan jumlah sarana dan prasarana yang ada		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	1. Jumlah jenis 2. Jumlah unit	0	unit	481.316.000,00	**APBD**	Pengadaan AC, PC Unit, Printer, CCTV, Laptop (untuk Operator website memory besar) , Pengadaan Mesin rumput, mesin chainsaw, mesin alkon	15	22.651.480
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	0	unit	-	**APBD**	Pembangunan Parkir motor, kanopi parkir mobil, kantin, gudang, record center Arsip di karena tempat-tempat tersebut belum cukup tersedia (cek dg standar harga dan pagu honorarium)	57	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlh Unit Kendaraan Dinas	32	unit	-	**APBD**	1 Unit Kendaraan Dinas Operasional Jabatan Eselon II , 3 Unit Kendaraan Dinas Jabatan Eselon III. 2 Unit Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat). 9 Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) Lapangan untuk PPLH (trail), 17 Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) Lapangan untuk Fungsional Pengendali dampak Lingkungan	32	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	12	Bulan	2.877.926.538,00			12	1.797.039.672

		Sukarame	disediakan							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	500.037.954,00	APBD	Adanya kenaikan tarif dasar listrik dan penambahan pemakaian untuk suplay listrik, Air ,Internet dan TV kabel di bangunan Gedung Perkim yang di alihkan ke DLHK (listrik taman Pintar, monumen Pancasila, taman Kutai Kartanegara, taman ulin, Taman Tua Himba, Listrik TPA,)	12	252.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2.377.888.584,00	APBD	Penambahan 16 orang tenaga THL pelimpahan dari OPD perkim dan Belanja Pihak Ketiga untuk Cleaning Service	12	1.545.039.672
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	64,5	Persen	6.474.330.050,00			64,5	101.688.570
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak	1	unit	124.330.050,00	APBD		1	16.888.570
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya	-	unit	-	APBD	Penambahan untuk sewa kendaraan dinas operasional sebanyak 5 unit karena 2 kendaraan dinas operasional		-

			Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan					dalam kondisi Rusak		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-	unit	250.000.000,00	APBD	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan seperti AC, Komputer dan Printer dan Genset, Pemeliharaan		-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	-	Unit	6.100.000.000,00	APBD	Pemintaan pagu untuk kebutuhan rehab gedung sekretariat dan ruang rapat dlhk (TERMASUK Lab???), pak hamid minta rehab bid 4, Rehab Total semua bidang, kpp Catatan Baru Untuk rehab gedung A, dan	1	84.800.000
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	100	Persen	500.000.000,00			100	400.000.000
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Tersusunnya RPPLH	4	Dokumen	500.000.000,00			4	235.000.000
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2	Dokumen	500.000.000,00	APBD	Untuk Pengendalian RPPLH, DIKPLH dan IKLH 2025	3	235.000.000
	Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Terselenggaranya KLHS	0	Dokumen	-			0	165.000.000

	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	1. Jumlah Dokumen 2. Jumlah data	1	Dokumen	-	APBD	Penyusunan KLHS telah selesai di laksanakan di tahun 2024, pagu anggaran akan di alihkan ke sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	1	165.000.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi	200.000	Pohon	3.838.000.000,00			200.000	2.826.000.000
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4	Dok	2.270.000.000,00			4	1.646.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2	Dokumen	900.000.000,00	APBD	Penambahan untuk perawatan alat pantau kualitas air secara kontinyu dan online (pergantian alat sensor, Honorarium operator dll), Pengeloaan Ipal domestik	3	430.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	Dokumen	370.000.000,00	APBD	Tidak ada perubahan	1	380.000.000

	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1	Dokumen	1.000.000.000,00	APBD	Indikator Menyesuaikan Kemendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 , Penambahan untuk Pemeliharaan alat AAS, Spektrofotometri, Aquadest dan kalibrasi alat serta pengadaan peralatan uji laboratorium untuk penambahan parameter (pengadaan Mikroskop dan Furnace).	1	836.000.000
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1	laporan	193.000.000,00			1	182.000.000
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah laporan sosialisasi informasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	1	Laporan	40.000.000,00	APBD	Tidak ada perubahan	1	40.000.000
	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Lokasi Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lahan terkontaminasi yang diisolasi	25	Lokasi	78.000.000,00	APBD	Tidak ada perubahan	25	75.000.000
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	50	Lokasi	75.000.000,00	APBD	Tidak ada perubahan	50	67.000.000

	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1	Dokumen	1.375.000.000,00			1	998.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	1	Dokumen	750.000.000,00	APBD	Penambahan Pagu untuk melakukan Kajian Dokumen Daya Tampung Beban Pencemaran pada 5 lokasi sungai, untuk meningkatkan kwalitas air	1	100.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1	Dokumen			Tidak Di dapat dijalankan karena kewenangan dari pusat terkait limbah B3		100.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1	Dokumen			Sub Kegiatan ini di mutakhirkan dan di pecah menjadi 2 sub kegiatan		231.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Tenggarong Sebrang, Kota Bangun, Sebulu, Muara Kaman, Loa Kulu	Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	1	Kegiatan	75.000.000,00	APBD	Penambahan pagu untuk Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitsi		
	Pelaksanaan Rehabilitasi	Tenggarong Sebrang, Kota Bangun, Sebulu, Muara	Jumlah Luas daerah Penanaman dan Jumlah Bibit yang ditanam	5	Ha	330.000.000,00	APBD	Penambahan untuk pembelian Bibit,Ongkos Tanam,dan Pemeliharaan	5	222.000.000

		Kaman, Loa Kulu								
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Sungai mangkurawang (tenggarong), Sungai Separi	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1	Dokumen			Sub Kegiatan ini di mutakhirkan dan di pecah menjadi 2 sub kegiatan		170.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	Sungai Mangkurawang	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1	Kegiatan	70.000.000,00	APBD	Penambahan pagu untu koordimasi ke BWS, BPDAS, P3EKA, DLH Prov, Rakor		
	Pelaksanaan Restorasi	Sungai Mangkurawang	luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	2	Ha	150.000.000,00	APBD	Pagu Penambahan di butuhkan untuk membersihkan Gulma di sungai mangkurawang Tenggarong karena akses masuk ke dalam sungai sudah tertutup oleh banyak nya gulma dan pohon-pohon yang tumbang	1	175.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame**	**Persentase pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luas perkotaan**	**20**	**Persen**	**4.136.590.000,00**			**20**	**2.220.000.000**

	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragama hayati Kabupaten Kota** **Tercapainya penanaman dan pemeliharan pengelolaan keanekaragaman hayati**	**1** **50**	**Dokumen** **Persen**	**4.136.590.000,00**			**1** **50**	**2.220.000.000**
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Jumlah Dokumen rencana induk pengelolaan Kehati yang disusun	1	Dokumen	400.000.000,00	**APBD**	Dokumen Rencana Pengelolaan Kehati menjelaskan tentang pengelolaan Kehati di kabupaten Kukar dan dokumen ini sebagai tindak lanjut dokumen Profil kehati di tahun 2020		-
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Tenggarong, Muara Kaman	Luas Taman Kehati yang dikelola diluar kawasan Hutan	13	Hektar	585.000.000,00	**APBD**	Tidak Ada perubahan pagu sesuai dengan rancangan awal		-
	pengelolaan kebun raya	Loa Kulu	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Hektar	300.000.000,00	**APBD**	Akan melaksanakan Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Kebun Raya, sisa pagu akan di alihkan Ke Sub Kegiatan Penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok TAHURA	5	400.000.000
								Berdasarkan data yang dimiliki bahwa luas RTH		

	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tenggarong, Tenggarong Seberang	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan	25	Hektar	2.436.590.000,00	**APBD**	Publik, Privat, Taman Bermain dan Hutan Kota termasuk RTH di Pemakaman di Kecamatan Tenggarong seluas 150,140 ha. Untuk Kecamatan Tenggarong Seberang, pengelolaan RTH hanya pada median jalan jalur 2 menuju ke Samarinda seluas 1,6 ha. (BBm, pemeliharaan, busi, racun rumput)	15	1.325.000.000
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Tenggarong, Samboja, Muara Kaman , Kota bangun, Muara Badak, Loa Janan, Muara Wis, Loa Kulu	Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	375	Orang	175.000.000,00	**APBD**	Penentuan Lokasi di sesuaikan dengan kelompok ternak kelulut yang sudah mendapatkan bantuan di tahun2020- 2023, Kegiatan yang akan di laksanakan adalah Peningkatan Kapasitas Peternak madu kelulut, Penambahan pagu di karenakan menyesuaikan dengan materi peningkatan kapasitas	375	195.000.000
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Tenggarong, Samboja, Muara Kaman , Kota bangun, Muara Badak, Loa	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	15	Unit	240.000.000,00	**APBD**	Penyesuaian Target capaian dari belanja pupuk, bibit dan sebagainya menjadi rencana pembangunan Gazebo dan Pos kemamanan	15	300.000.000

		Janan, Muara Wis, Loa Kulu								
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		**Jumlah Dokumen Kajian timbulan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara**	**4**	**Dokumen**	**400.000.000,00**			**4**	**175.000.000**
	Penyimpanan Sementara Limbah B3		**Jumlah pelaku usaha**	**50**	**Pelaku usaha**	**100.000.000,00**			**50**	**100.000.000**
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	50	Dokumen			Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena batas kewenangan, sehingga anggaran dialihkan ke sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	-	25.000.000
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	50	Laporan	100.000.000,00	**APBD**	Bahwa Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan tidak hanya pada Permohonan Baru tetapi dilakukan Verifikasi pada Tempat Penyimpanan Limbah B3 yang sudah Beroperasi di dalam wilayah kabupaten	1	75.000.000

								Kutai Kartanegara		
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Jumlah Pelaku Usaha pengumpul limbah B3**	**50**	**Pelaku usaha**	**300.000.000,00**			**50**	**75.000.000**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3	40	Dokumen	300.000.000,00	**APBD**	Kegiatan Koordinasi dengan Propinsi dan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup) dalam Pengelolaan dan Kebijakan skala Propinsi dan Nasional	3	75.000.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten**	**19,32**	**Persen**	**600.000.000,00**			**19,32**	**595.000.000**
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau	**Kabupaten**	**Persentase jumlah pembinaan/pengawasan**							

	Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Kutai Kartanegara**	**yang dilakukan terhadap jumah izin usaha yang diterbitkan**	**20**	**Persen**	**600.000.000,00**			**20**	**595.000.000**
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	120	Dokumen			Pengurangan anggaran karena hingga saat ini belum dibentuknya lembaga uji, pagu di alihkan ke sub kegiatan	120	105.000.000
	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Sulawesi Selatan, Makassar	Jumlah PNS yang dibentuk dandiangkat menjadi Fungsional PPLHD	3	orang	85.000.000,00		Tambahan/pembentukan PPLH dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan, Sesuai Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	-	-
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi fungsional PPLHD	9	Orang	200.000.000,00		ditambah guna menambah kompetensi PPLH	9	100.000.000
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	120	Laporan	315.000.000,00		Target Menyesuaikan dengan pemutakhiran Perhitungan Target Ikk Lppd Tahun 2023	120	310.000.000

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	20	Dokumen			Dihilangkan karena sudah tidak terdapat Sub Kegiatan ini pada Kepmendagri-No-900.1.15.5-1317-Tahun-2023	20	80.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	1. **Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun** 2. **Timbulan sampah**	**1** **97.64**	**Lokasi** **Persen**	**59.680.905.990,00**			**1** **97.64**	**11.800.000.000**
	Pengelolaan Sampah	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	1. **Persentase Jumlah sampah yang ditangani** **2. Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R** **3. Persentase cakupan area pelayanan**	**72** **12,73** **61,11**	**Persen** **Persen** **Persen**	**59.680.905.990,00**			70,00 29,96 83,33	**11.800.000.000**
	Penyusunan Strategi Kebijakan dan Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Kebijakan dan strategi daerah pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan	3	Dokumen	490.000.000,00	**APBD**	1. Kesesuaian Kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan oleh Pihak Tenaga Ahli, Perbub Pengelolaan sampah dan Laporan Capaian Kebijakan Pengelolan Sampah, Penambahan 1 peraturan bupati	4	290.000.000
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan		Jumlah laporan hasil					Pembangunan TPS3R dan		

	Pemanfaatan Kembali	Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1	Laporan	14.350.941.690,00	**APBD**	Sarana Pendukungnya , pembangunan TPS3R belum ada di Tenggarong dan ini sifatnya wajib untuk mendukung Adipura Kabupaten	24	710.000.000
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	60529,994	Laporan	35.849.464.300,00	**APBD**	Berdasarakan evaluasi tahun 2024 penambahan pagu terdapat penganggaran gaji PHL untuk pemenuhan 19 kecamatan masing2 10 orang per kecamatan, untuk pemenuhan Sapras, (Biaya 20.000.000.000 Pengelolaan sampah di 19 kecamatan)	61890,934	2.950.000.000
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	5	Kelompok	1.500.000.000,00	**APBD**	Penambahan pagu untuk Melaksanakan event agen lingkungan dan memberikan penghargaan serta menentukan duta sampah, pembuatan dokumenter iklan layanan masyarakat	5	880.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana				**APBD**	Penambahan lokasi Penyusunan Fs dan Dokumen DED, UKL-UPL pada 7 Kegiatan (Penyusunan FS dan DED TPST PDU samboja, Anggana,muara		

	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	2	Dokumen	3.050.000.000,00		kaman, tenggarong, penyusunan dokumen UKL-UPL Amdal Kec tenggarong, DED Kec Tenggarong, UKL-UPL amdal TPA Bekotok) (Plus 4 apabila di tahun 2024 tidak dapat di laksanakan ,Sekiranya ada penundaan Pengadaan lahan di DPPR (Kebutuhan tambahan Anggaran 3.000.000.000)	1	150.000.000
	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2	Dokumen	250.000.000,00	**APBD**	Penambahan Anggaran untuk membuat MOU Pengelolaan Sampah DLHK demgan 20 Kecamatan	2	100.000.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	19	Unit	4.190.500.000,00	**APBD**	Penambahan pagu untuk Penambahan peralatan kebersihan , pakaian PHL, landasan bak kontainer, tps 3 warna	671	6.720.000.000
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota**	**75**	**Persen**	**75.000.000,00**			**75**	**75.000.000**
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota**	**75**	**Persen**	**40.000.000,00**			**75**	**40.000.000**

	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	5	Dokumen	40.000.000,00	**APBD**	Pagu Tidak ada perubahan dari rancangan aw	5	40.000.000
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Persentse peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat**	**70**	**Persen**	**35.000.000,00**			**70**	**35.000.000**
	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	1	Dokumen	35.000.000,00	**APBD**	Pagu Tidak ada perubahan dari rancangan aw	1	35.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan pendidikan/pelatihan/penyuluhan**	**35**	**Lembaga**	**480.000.000,00**			**35**	**240.000.000**

	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Jumlah diklat dan penyuluhan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota**	**35**	**kali**	**480.000.000,00**			**35**	**240.000.000**
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	2	Lembaga	80.000.000,00	**APBD**	Pagu Tidak ada perubahan dari rancangan aw	2	80.000.000
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	30	Dokumen	250.000.000,00	**APBD**	Perlunya insentif bagi sekolah yang berprestsi dalam melaksanakan program Gerakan Peduli dan Berbudaya(GPB) LH	30	80.000.000
	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	325	Orang	150.000.000,00	**APBD**	dana dialihkan ke Program Gerakan Peduli L	300	80.000.000

	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	1. **Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama** 2. **Jumlah Penghargaan Yang Diberikan**	**5** **128**	**Desa/Kelurahan** **Penghargaan**	**2.451.125.000,00**			**5** **128**	**100.000.000**
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat	**Kabupaten**	**Jumlah Jenis Penghargaan yang diberikan kepada**	**2**	**Jenis**	**2.451.125.000,0**			**2**	**100.000.000**

	Daerah Kabupaten/Kota	**Kutai Kartanegara**	**Masyarakat/Dunia Usaha/Lembaga Lainnya**			**0**				
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	124	Entitas	2.451.125.000,00	**APBD**	Penambahan dialokasikan untuk membiaya insentif bagi desa/kelurahan yang mendapatkan predikat DESA/KELURAHAN IDAMAN dan tim pembina dan penilai Desa Ramah lingkungan diluar Tim yang ada di DLHK	20 128	100.000.000
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabuapten/Kota yang ditangani**	**97**	**Persen**	**250.000.000,00**			**97**	**200.000.000**
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Jumlah laporan Pengaduan masyarakt di Bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti**	**50**	**Laporan**	**250.000.000,00**			**50**	**200.000.000**
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH	Kabupaten Kutai	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH	20	Dokumen	20.000.000,00	**APBD**	digunakan untuk membangun aplikasi	15	100.000.000

	Kabupaten/Kota	Kartanegara	yang ditindaklanjuti/ditangani					pelaporan pengaduan		
	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	20	Perkara	180.000.000,00	**APBD**	Penambahan Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri-No-900.1.15.5-1317-Tahun-2023	15	100.000.000
	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangankabupaten/kota	10	perkara	50.000.000,00	**APBD**	Penurunan Target capaian kinerja karena terkait kewenangan kabupaten/kota,	0	
	Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	0	Persen	-	-	-	100,00	75.000.000,00
	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah pelayanan yang dilakukan	0	Pelaku Usaha	-	-	-	10	75.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	0	Persen	-	-	-	100,00	285.000.000,00

	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	0	Laporan	-	-	-	15	55.000.000
	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga dalam pengelolaan sampah melaksanakan penilaian kinerja	0	Unit	-	-	-	50	155.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah monitoring dan evalausi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	0	Laporan	-	-	-	25	75.000.000
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	**Muara Kamam, Muara Siran**	**Persentase Penyelesaian Perencanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)**	**16,67**	**Persen**	**1.250.000.000,00**			**16,67**	**300.000.000**
	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	**Muara Kamam, Muara Siran**	**Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura**	**1**	**Dokumen**	**1.250.000.000,00**			**1**	**300.000.000**
	Penyusunan rencana	Muara	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan	0	Dokumen	350.000.000,00	**APBD**	Setelah dilakukan penetapan dan penataan batas luar Tahura pada tahun 2024 maka akan dilakukan	-	-

	pengelolaan dan penataan blok TAHURA	Kamam, Muara Siran	Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota					penyusunan peta blok tahura yang akan membagi tahura menjadi beberapa blok pengelolaan dan pembuatan peta penataan wilayah kerja pengelolaan tahura.		
	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Muara Kaman, Kota Bangun, Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	2	Dokumen	600.000.000,00	**APBD**	Dokumen pengelolaan tahura baik jangka panjang dan jangka pendek akan memberikan arahan dan kebijakan dalam pengelolaan tahura untuk jangka waktu tertentu sehingga pengelolaan tahura dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.	-	-
	Kerja SamaPenyelenggaraaan Tahura Kabupaten/Kota	Muara Siran	Koordinasi	15	Kali	150.000.000,00	**APBD**	Sesuai dengan pagu ranwal tidak ada penambahan	15	150.000.000
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura Kabupaten/Kota	Muara Siran	Jumlah Peserta	100	Orang	150.000.000,00	**APBD**	Sesuai dengan pagu ranwal tidak ada penambahan	100	150.000.000
						102.546.316.132,00				**33.500.680.979,00**

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan Dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memuat tentang program dan kegiatan selama periode 1 (satu) tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyusunan Renja dilakukan dengan pendekatan partisipatif, *Top-Down* dan *Bottom-Up*. Sehingga dilakukan penyesuaian antara tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, partisipasi masyarakat dan pokok- pokok pikiran (Pokir) DPRD.

Proses penyusunan rencana kerja ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari semua komponen di masyarakat dan di Internal Dinas Lingkugann Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan seluruh personel di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kompeten, sehingga hasilnya diharapkan lebih optimal.

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Pada tahun 2025, pelaksanaan kegiatan diutamakan dalam mendukung Indikator Kinerja Utama sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara. Yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan tutupan lahan. Selain itu pemenuhan target Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang melekat pada masing-masing program.

Pada Standar Pelayanan Umum Minimal (SPM) sebagai amanat UU No.23 Tahun 2014, Pasal 1 menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu, serta Pasal 18 menyebutkan bahwa Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan peraturan pemerintah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak termasuk OPD yang mengampu Standard Pelayanan Minimal (SPM) 2025.

Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi pada Ratekno RPJMN tahun 2025-2029 yang masuk kedalam Urusan Lingkungan Hidup yaitu Kualitas Lingkungan Hidup:

1. Kualitas air, udara, tutupan lahan, dan air laut semakin menurun. Indeks Kesehatan Laut (OHI) Indonesia masih rendah (63) atau baru berada pada peringkat 152 dari 220 wilayah global. Biaya kesehatan akibat pencemaran lingkungan menjadi tinggi.
2. Peningkatan luasan lahan terkontaminasi limbah B3 yang cukup signifikan akibat pembuangan limbah secara ilegal.
3. Terdapat setidaknya sepuluh provinsi yang status TPA-nya sudah melebihi kapasitas daya tampungnya, antara lain: Provinsi Bengkulu, Kepulauan Riau, Jawa Barat, DIY, Banten, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Maluku.
4. Laju Kepunahan Spesies global semakin cepat dan sudah puluhan hingga ratusan kali lebih tinggi daripada rata-rata selama 10 (sepuluh) juta tahun terakhir. Saat ini, sekitar 1 (satu) juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan.

Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegarara mengamanatkan pada Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Sub Kegiatan Pengelolaan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Beserta Habitatnya di Tahura Kabupaten/Kota.

Adapun Sasaran Pembangunan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi, Urusan Lingkungan Hidup adalah Lingkungan Hidup Berkualitas dengan Indikator Pembangunan:

1. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2. Kualitas Lingkungan Hidup:

a. Indeks Kualitas Lingkungan
b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)
c. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)

Pada Arah Kebijakan Urusan Lingkungan Hidup Pada sasaran pembangunan ketiga, yaitu Lingkungan Hidup Berkualitas, terdapat berbagai arah kebijakan untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPK), persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah, serta persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman. Peningkatan IKLH dilakukan melalui (1) peningkatan kualitas lingkungan hidup; (2) penurunan laju deforestasi; (3) penguatan perencanaan, kelembagaan, dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; (4) pembangunan *forest city* IKN; dan (5) perencanaan dan pencegahan dampak lingkungan hidup. Sementara itu, peningkatan IPK dilakukan dengan (1) pengurangan kehilangan keanekaragaman ekosistem dan spesies; (2) pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan; dan (3) pengelolaan sumber daya genetika.

Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Penunjang Program Nasional/RPJMN 2025 yaitu pada Program:

1. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP;
2. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP;
3. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3);
4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH);
5. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
6. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN; dan
7. PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA.

Secara umum, tujuan pembangunan daerah urusan lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Timur adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sesuai dengan Rancangan RKPD ditetapkan target kinerja nilai indeks kualitas lingkungan hidup Tahun 2025 , dan Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakannya pada seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk Menunjang Program Provinsi/RPJMD Provinsi Kaltim 2025.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran. Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar betul-betul dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa berprinsip pada asas efisiensi, efektifitas serta akuntabilitas dan juga tetap berpedoman pada perencanaan yang sudah disusun dengan terget sasaran yang sudah ditetapkan.

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

ff.RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATAN MANUSIA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan, selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD), yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yangdilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan PD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025.

3. RENJA PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Daerah menciptakan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang lebih rasional dengan tetap Memberikan peran partisipasi masyarakat yang lebih besardalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanKabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3. Maksud dan tujuan

Penyusunan RENJA Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanKabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2021 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

Sedangakan tujuan disusunnya RENJA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanKabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Pelaksanaan kegiatan Damkarmatan Tahun 2023 secara umum selaras dengan Renja Damkarmatan 2023, demikian juga untuk tahun berjalan yaitu tahun 2024. Adapun Evaluasi terhadap Capaian Program Kegiatan tahun 2023 sebagai Berikut :

1) Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penataan Barang Milik Daerah pada SKPD Target 12 Llaporan Realisasi 0 Laporan (0%)

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Damkar) Target 4 Paket Realisasi 0 Paket (0%)
b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Damkar) Target 5 orang Realisasi 0 orang (0%)
c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Damkar) Target 50 orang Realisasi 0 orang (0%)

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Target 10 Paket Realisasi 0 Paket (0%)
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Target 5 Paket Realisasi 0 Paket (0%)
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Target 6 Paket Realisasi 0 Paket (0%)
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Target 10 Paket Realisasi 0 Paket (0%)

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target 12 Paket Realisasi 0 Paket (0%)

f. Penyediaan Bahan/Material Target 6 Paket Realisasi 0 Paket (0%)

g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Target 3 Dokumen Realisasi 0 Dokumen (0%)

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Mebel Target 2 Paket Realisasi 0 Paket (0%)

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Target 5 Unit Realisasi 0 Unit (0%)

c. Pengadaan Aset Tetap Lainnya Target 3 Unit Realisasi 0 Unit (0%)

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Target 2 Unit Realisasi 0 Unit (0%)

Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Target 55 Unit Realisasi 0 Unit (0%)

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Target 30 Unit Realisasi 0 Unit (0%)

2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Target 55 Unit Realisasi 0 Unit (0%)

Kegiatan : Investigasi Kejadian Kebakaran

Sub Kegiatan :

a. Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Target 60 Dokumen Realisasi 3 Dokumen (0%)

Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Sub Kegiatan :

a. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana 28 Dokumen Realisasi 0 Dokumen (0%)

Kegiatan : Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Target 75 Unit Realisasi 0 unit (0%)

2) Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

   Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan :

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Damkar) Target 6 Dokumen Realisasi 4 Dokumen (66,67%)
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Target 10 Laporan Realisasi 3 Laporan (30%)
   c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Target 2 Laporan Realisasi 2 Laporan (100%)

   Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan :

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Target 1106 orang/bulan Realisasi 477 orang/bulan (43,13%)
   b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD Target 12 Dokumen Realisasi 6 Dokumen (50%)

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Target 1 Laporan Realisasi 1 Laporan (100%)

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Target 12 Laporan Realisasi 6 Laporan (50%)

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target 12 Laporan Realisasi 6 Paket (50%)

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Target 12 Laporan Realisasi 5 Laporan (41,67%)

Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Target 2 Unit Realisasi 1 Unit (50%)

2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Target 60 Laporan Realisasi 30 Laporan (50%)

b. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Target 12 Laporan Realisasi 6 Laporan (50%)

c. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Target 5 orang Realisasi 2 Orang (40%)

d. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, danKemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Target 7 Dokumen Realisasi 2 Dokumen (28,57%)

Kegiatan : Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Sub Kegiatan :

a. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Target10 Dokumen Realisasi 4 Dokumen (40,00%)
b. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Target 10 Dokumen Realisasi 2 Dokumen (20,00%)

Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Sub Kegiatan :

a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Target 375 Orang Realisasi 130 Orang (34,67%)
b. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Target 43 Desa Realisasi 41 Desa (95,35%)

Kegiatan : Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Sub Kegiatan :

a. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Target 12 Laporan Realisasi 6 Laporan (50%)

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tidak ada sub kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan

4. Adapun Faktor – Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya Target Kinerja Program Kegiatan antara lain:

1) Beberapa kegiatan Salah dalam pengganggaran belanja
2) Waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Material sulit ditemukan di pasar
3) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengadaan Barang dan Jasa

5. Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

   Adanya Permasalahan – Permasalahan diatas, berimplikasi terhadap tidak tercapainya target Kinerja beberapa Program / Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026.

6. Kebijakan / tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut :
   1) Perlunya Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang berkaitan dengan Penganggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa
   2) Meperhitungkan pengadaan Barang dan jasa dengan pasar
   3) Penggunaan Aplikasi Umum dan Khusus oleh seluruh Perangkat Daerah (Seluruh Perangkat Daerah)
   4) Dukungan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
   5) Penggunaan Aplikasi Umum dan Khusus oleh seluruh Perangkat Daerah (Seluruh Perangkat Daerah)
7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

1. Peningkatan Sarana Prasarana
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia
3. Penambahan Sumber Daya Manusia

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja- PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
						Target Renja-PD Tahun -2024	Realisasi Renja- PD Tahun -2024	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan -2025	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
1 5 1 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79		70	70	100			
1 5 1 2 1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	36	8	18	9	50	9	26	72.22

1	5	1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	28	4	6	4	66.67	7	15	53.57
1	5	1	2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4	4	10	3	30	1	8	200.00
1	5	1	2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	0	2	2	100	1	3	75.00
1	5	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	204	83	93	86	92.47	106	275	134.80
1	5	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan	100	79	80	79	98.75	80	238	238.00
1	5	1	2	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	48	4	1	1	100	12	17	35.42
1	5	1	2	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	56	0	12	6	50	14	20	35.71

1	5	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		700	0	59	0	0	180	180	25.71
1	5	1	2	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	600	0	4	0	0	150	150	25.00
1	5	1	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	0	0	5	0	0	5	5	#DIV/0!
1	5	1	2	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Orang	100	0	50	0	0	25	25	25.00
1	5	1	2	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Laporan	0	0	12	0	0	0	0	#DIV/0!
1	5	1	2	3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	12	0	0	0	0	#DIV/0!
1	5	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan			104	16	15.38		16	#DIV/0!

1	5	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket	6800	3	5	0	0	1700	1703	25.04
1	5	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	11560	122	10	0	0	2890	3012	26.06
1	5	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	12	3	12	0	0	12	15	125.00
1	5	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	140	10	50	8	16	35	53	37.86
1	5	1	2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	Dokumen	400	3	3	0	0	100	103	25.75
1	5	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Paket	12	3	12	8	66.67	12	23	191.67
1	5	1	2	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	12	3	6	0	0	12	15	125.00
1	5	1	2	6	7	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Penyediaan Bahan/ Material	Paket	12	0	6	0	0	12	12	100.00
1	5	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit			100	0	0		0	#DIV/0!

1	5	1	2	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	18	200	2	0	0	4	204	1133.33
1	5	1	2	7	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Unit	0	0	3	0	0	0	0	#DIV/0!
1	5	1	2	7	6	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Unit	0	0	5	0	0	0	0	#DIV/0!
1	5	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Pengadaan Mebel	Unit	390	1	90	0	0	90	91	23.33
1	5	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	36	6	24	11	45.833	36	53	147.22
1	5	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	0	0	0	12	12	100
1	5	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3	12	6	50	12	21	175

1	5	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3	12	5	41.67	12	20	166.67
1	5	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	220	40	87	1	1.15	70	111	50.45
1	5	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	100	15	55	0	0	40	55	55
1	5	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	2	1	50	0	1	#DIV/0!
1	2	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	120	25	30	0	0	30	55	45.83

1	5	1	5	4		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			1314	374	767	226	29.47	550	1150	87.52
1	5	4	2	1		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola		494	214	139	40	28.78	225	479	96.96
1	5	4	2	1	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	265	17	60	30	50	75	122	46.04
1	5	4	2	1	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	80	30	12	6	50	25	61	76.25
1	5	4	2	1	7	Pembinaan Apartur Pemadam Kebakaran	Jumlah Pembinaan Apartur Pemadam Kebakaran	Orang	73	70	5	2	40	64	136	186.30

1	5	4	2	1	17	Pengadaan Sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	60	93	55	0	0	55	148	246.67
1	5	4	2	1	18	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran	Dokumen	16	4	7	2	28.57	6	12	75
1	5	4	2	2		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		600	0	20	6	30	200	206	34.33

1	5	4	2	2	1	Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah DokumenPendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	300	0	10	4	40	100	104	34.67
1	5	4	2	2	2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	300	0	10	2	20	100	102	34
1	5	4	2	3		Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Investigasi Kejadian Kebakaran		3	0	60	3	5	1	4	133.33
1	5	4	2	3	1	Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Jumlah Dokumen Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	3	0	60	3	5	1	4	133.33
1	5	4	2	4		Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran		97	160	446	171	38.34	67	398	410.31

1	5	4	2	4	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Orang/ Kelompok	40	150	375	130	34.67	10	290	725
1	5	4	2	4	2	Pembentukkan dan Pembinaan Relawan Pemadam kebakaran	Jumlah Desa/ Kelurahan Pembentukkan dan Pembinaan Relawan Pemadam kebakaran	Desa/ Kelurahan	45	5	43	41	95.35	45	91	202.22
1	5	4	2	4	3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Dokumen	12	5	28	0	0	12	17	141.67

1	5	4	2	5			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Jumlah Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia		120	0	102	6	5.88	57	63	52.50
1	5	4	2	5	1		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	12	0	12	6	50	12	18	150.00
1	5	4	2	5	2		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertoongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Jumlah Laporan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertoongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Laporan	36	0	12	0	0	12	12	33.33

1	5	4	2	5	3	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi	Jumlah Dokumen Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi	Dokumen	12	0	3	0	0	3	3	25.00
1	5	4	2	5	5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Unit	60	0	75	0	0	30	30	50.00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam menentukan skala penilaian kinerja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berikut capaian kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2023 berdasarkan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Kartanegara

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-10	-11	-12	-13	-14
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			0	79	79	0	0	79	79	0	
2	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	8	9	9	0	8	9		Capaian sesuai dengan target kinerja
3	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			0	6	38	38	0	6	16		Capaian Kinerja pada tahun 2023 dan 2024 tidak sesuai dengan Target Renstra PD
4	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			0	0	0	0	0	0	0		Tidak ada Capaian kinerja dan Target Renstra PD

5	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			0	2	2	2	0	0	0	Capaian Kinerja pada tahun 2023 dan 2024 tidak sesuai dengan target kinerja Renstra PD
6	Jumlah Dokumen Administrasi umum Perangkat Daerah			0	11	20	20	0	11	1	Capaian Kinerja pada tahun 2023 dan 2024 tidak sesuai dengan target kinerja Renstra PD
7	Jumah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah			0	119	107	114	0	234	0	Capaian Kinerja pada tahun 2023 melebihi Target Renstra PD dan capaian kinerja pada tahun 2024 tidak sesuai dengan Target Renstra PD
8	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			0	7	24	24	0	3	16	Capaian Kinerja pada tahun 2023 dan 2024 tidak sesuai dengan target kinerja Renstra PD
9	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah			0	50	50	70	0	50	1	Capaian Kinerja pada tahun 2023 dan 2024 tidak sesuai dengan target kinerja Renstra PD

10	Jumlah Laporan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota			0	6	10	11	0	6	4		Capaian Kinerja pada tahun 2023 dan 2024 tidak sesuai dengan target kinerja Renstra PD
11	Jumlah Laporan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			0	0	2	2	0	0	2		Capaian Kinerja pada tahun 2023 tidak sesuai dengan Target Renstra PD dan Capaian kinerja tahun 2024 sesuai dengan target kinerja
12	Jumlah Laporan Investigasi Kejadian Kebakaran			0	0	1	1	0	0	1		Capaian Kinerja pada tahun 2023 tidak sesuai dengan Target Renstra PD dan Capaian kinerja tahun 2024 sesuai dengan target kinerja

13	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	SPM		0	3	3	3	0	3	2		Capaian Kinerja pada tahun 2024 tidak sesuai dengan Target Renstra PD dan Capaian kinerja tahun 2023 sesuai dengan target kinerja
14	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi membahayakan manusia	SPM		0	1	4	4	0	1	1		Capaian Kinerja pada tahun 2023 tidak sesuai dengan Target Renstra PD dan Capaian kinerja tahun 2024 sesuai dengan target kinerja

2.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Capaian Program Nasional/ Internasional, SPM dan MDGs.

Tabel 2.3
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG PELAYANAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN SASARAN RPJMD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Misi dan Sasaran RPJMD yang terkait dengan Peran Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
-1	-2	-3	-4
1	*MISI 5 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan* *Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah*	Belum kuatnya kerjasama dalam upaya peningkatan layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
			Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan
			Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran
		Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan keselamatan terhadap bahaya kebakaran dan bencana lainnya	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat
			Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran
		Masih minimnya jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik
			Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
			Standarisasi sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggukangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

		Masih rendahnya secara kuantitas dan kualitas petugas pemadam kebakaran dalam pemadaman kebakaran, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Adanya kegiatan pembinaan aparatur pemadam kebakaran

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanKab. Kutai Kartanegara pada tahun 2025

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanKab. Kutai Kartanegara tahun 2025 pada tabel dibawah ini :

2.5 Penelaahan Program Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Untuk tahun 2025 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara belum ada usulan dari Pemangku Kepentingan.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Alat pelindung diri	30 Unit	Akan ditindaklanjuti
2	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Mesin Pompa, Selang, Nozle, Conection, baju tahan panas, sepatu, helm)	14 Unit	Akan ditindaklanjuti
3	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	Kota Bangun Ilir	Jumlah Mesin Pompa, Selang, Nozle, Conection, baju tahan panas, sepatu, helm)	1 Unit	Akan ditindaklanjuti

BAB III
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan

Arah kebijakan umum Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rensta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	1. Mengembangkan basis data informasi kinerja
				2. Mengoptimalkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan sistem perencanaan dan pelaporan
	2	Meningkatnya Kesiapsiagaan Petugas dan Masyarakat dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Pengedalian Kebakaran	Membangun sistem dan penguatan kapasitas petugas dan masyarakat dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Pengedalian Kebakaran	1. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran
				2. Melakukan Pembentukan dan pembinaan kepada Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar)
				3. Melakukan pendataan dan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran
				4. Menyelenggarakan dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana
	3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Melindungi masyarakat melalui	1. Membangun sistem komunikasi, informasi kebakaran dan penyelamatan
		Pemadaman dan Penyelamatan	pengurangan resiko kebakaran serta peningkatan upaya penyelamatan	2. Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri

				3. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
				4. Melakukan pembinaan aparatur pemadam kebakaran
				5. Melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
				6. Melaksanakan pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota
				7. Menyelenggarakan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota
				8. Melakukan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran
				9. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran
				10. Memaksimalkan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota
				11. Melakukan Penyusunan, kajian dan pemutahiran rencana induk sistem penanggulangan kebakaran dan penyelamatan (RISPKP)
	4	Meningkatnya Penyelenggaraan Operasi Pencarian &	Melindungi Masyarakat dari Kondisi Membahayakan	1. Melakukan pemeliharaan sarana prasarana Pemadaman dan Penyelematan secara berkala

		Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	melalui Penyelenggaraan Operasi Pencarian & Pertolongan	2. Melakukan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia
				3. Mengadakan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi
				4. Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi
				5. Melakukan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara menyesuaikan atau mensinkronisasi dalam berbagai kebijakan strategis yaitu melalui Program :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanKabupaten Kutai Kartanegara.

3.2.1 Tujuan Renja Perangkat Daerah

Tujuan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah ”Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan”.

3.2.2 Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah :

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi
2. Meningkatnya Kesiapsiagaan Petugas dan Masyarakat dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Pengendalian Kebakaran

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan
4. Meningkatnya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Program dan Kegiatan

a) Faktor –faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2025 adalah Visi Bupati Kutai Kartanegara “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

Untuk mencapai Visi tersebut maka dilakukan berbagai upaya strategis, salah satu upaya itu dituangkan dalam Sasaran RPJMD Kabupaten kutai Kartanegara. Dalam Sasaran RPJMD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki 1 Tujuan dan 2 Sasaran yang sudah ditetapkan melalui turunan Sasaran RPJMD Kabupaten antara lain :

Tujuan :

”Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan”.

Sasaran :

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi
2. Meningkatnya Kesiapsiagaan Petugas dan Masyarakat dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Pengendalian Kebakaran
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan
4. Meningkatnya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia

b) Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Jumlah Progam yang direncanakan pada tahun 2025 adalah sebanyak 2 Program, yang terdiri dari 1 (satu) Program Rutin dan 1 (satu) Program Urusan Pemerintahan.

Rincian Program sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Dari 2 (dua) Program diatas, dijabarkanlah ke dalam bentuk Kegiatan dan Sub Kegiatan. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dllaksanakan Dinas

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kutai Kartanegara sebanyak 13 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan. Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut disusun sesuai dengan indikator kinerja, target, lokasi, sasaran dan kebutuhan dana (pagu indikatif).

Kebutuhan dana pagu dari seluruh Program / Kegiatan tersebut pada tahun 2025 sebesar Rp. 204.934.489.184,- *(Dua Ratus Empat milyar Sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat rupiah)*

c) Rumusan Program dan Kegiatan memiliki beberapa sub kegiatan yang tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD dikarenakan beberapa hal antara lain:

a. Adanya Penyesuaian Output Indikator Sub Kegiatan
b. Adanya perubahan subkegiatan yang ada di SIPD
c. Adanya pemetaan subkegiatan yang baru dari subkegiatan lama yang ada di Renstra dengan subkegiatan baru yang ada di SIPD
d. Adanya tambahan subkegiatan baru menyesuiakan dengan analisis kebutuhan dan paket pekerjaan

d) Tabel Rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut :

TC 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		79,00 Nilai	60,208,036,428			79,00 Nilai	152,089,489,184
1.05.01.2.01.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9 Dokumen	450,000,000			36 Dokumen	1,800,000,000
1.05.01.2.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	7 Dokumen	200,000,000	APBD		28 Dokumen	800,000,000
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Tenggarong	1 Dokumen	100,000,000	APBD		4 Dokumen	400,000,000

		Kinerja SKPD							
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	1 Dokumen	150,000,000	APBD		4 Dokumen	600,000,000
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		36 Laporan	17,080,000,000			152 Laporan	37,903,757,384

1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	12 bulan	16,350,000,000	APBD		48 Bulan	36,143,757,384
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Administrasi	Tenggarong	12 Bulan	650,000,000	APBD		48 Bulan	1,440,000,000
1.05.01.2.02.08	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Tenggarong	14 Laporan	80,000,000	APBD		56 Laporan	320,000,000
1.05.01.2.04	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		0 Dokumen	0			0 Dokumen	0
1.05.01.2.04.01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	0 Laporan	0	APBD		0 Laporan	0
1.05.01.2.04.02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tenggarong	0 Paket	0	APBD		0 Paket	0

1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		2 Dokumen	400,000,000			2 Dokumen	1,600,000,000
1.05.01.2.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong	150 Paket	300,000,000	APBD		600 Paket	1,200,000,000
1.05.01.2.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Tenggarong	25 Orang	100,000,000	APBD		100 Orang	400,000,000
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah			875,500,000				3,502,000,000

1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Buah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tenggarong	100 Buah	10,500,000	APBD		400 Buah	42,000,000
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Tenggarong	1700 Rim/Buah	110,000,000	APBD		6800 Rim/Buah	440,000,000
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Tenggarong	120 Buah	65,000,000	APBD		480 Buah	260,000,000
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Buah/Porsi Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tenggarong	2890 Buah/Porsi	100,000,000	APBD		11560 Buah/Porsi	400,000,000
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tenggarong	7500 Blok/Lembar	85,000,000	APBD		30000 Blok/Lembar	340,000,000
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	35 Orang	330,000,000	APBD		140 Orang	1,320,000,000
1.05.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	100 Arsip	100,000,000	APBD		400 Arsip	400,000,000

1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Bulan Pelaksaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik	Tenggarong	12 Bulan	75,000,000	APBD		48 Bulan	300,000,000
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		114 Unit	31,250,000,000			479 Unit	84,500,000,000
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit Mebel tersedia	Tenggarong	90 Unit	1,250,000,000	APBD		360 Unit	600,000,000
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Tenggarong	20 Unit	20,000,000,000	APBD		91 Unit	66,000,000,000

1.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tenggarong	4 Unit	10,000,000,000	APBD		18 Unit	17,900,000,000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		3 Dokumen	5,562,536,428			3 Dokumen	16,623,731,800
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai tersedia	Tenggarong	990 Lembar	7,500,000	APBD		3960 Lembar	30,000,000
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tenggarong	12 Bulan	550,000,000	APBD		48 Bulan	1,032,000,000
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji THL	Tenggarong	12 Bulan	5,005,036,428	APBD		48 Bulan	15,561,731,800
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah		70 Unit	4,590,000,000			220 Unit	6,160,000,000

1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tenggarong	40 Unit	4,500,000,000	APBD		100 Unit	5,800,000,000
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	Tenggarong	30 Unit	90,000,000	APBD		120 Unit	360,000,000

1.05.01.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			100 Persen	32,200,000,000			100 Persen	52,845,000,000
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			28,020,000,000				41,065,000,000
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tenggarong	1 Dokumen	220,000,000	SPM		4 Dokumen	660,000,000
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tenggarong	75 Laporan	550,000,000	SPM		265 Laporan	1,440,000,000

1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korabn Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah laporan Penyelamatan dan Evakuasi Korabn Kebakaran dan Non Kebakaran	Tenggarong	250 Laporan	200,000,000	SPM		290 Laporan	300,000,000
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tenggarong	55 Unit	25,000,000,000	SPM		155 Unit	35,000,000,000
1.05.04.2.01.08	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tenggarong	10 Dokumen	100,000,000	SPM		40 Dokumen	400,000,000
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah peserta Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tenggarong	64 Orang	1,200,000,000	SPM		73 Orang	1,400,000,000

1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Jumlah wilayah Penyelenggaraan Kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Tenggarong	6 Wilayah	200,000,000	APBD		16 Wilayah	700,000,000
1.05.04.2.01.10	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISKP)	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISKP)	Tenggarong	0 Dokumen	50,000,000	SPM		1 Dokumen	100,000,000
1.05.04.2.01.11	Peningkatan Kompetensi Pejabat fungsional pemadam kebakaran dan anais kebakaran	Jumlah laporan Peningkatan Kompetensi Pejabat fungsional pemadam kebakaran dan anais kebakaran	Tenggarong	10 Laporan	100,000,000	SPM		22 Laporan	240,000,000

1.05.04.2.01.12	Pemutakhiran rencana induk sistem penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Jumlah dokumen Pemutakhiran rencana induk sistem penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Tenggarong	1 Dokumen	200,000,000	SPM		2 Dokumen	225,000,000

1.05.04.2.01.13	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK)	Jumlah dokumen Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK)	Tenggarong	1 Sistem	200,000,000	APBD		3 Sistem	600,000,000
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi kebakaran	Jumlah dokumen Inspeksi Peralatan Proteksi kebakaran		2 Dokumen	450,000,000			2 Dokumen	1,050,000,000
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah unit Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Tenggarong	100 Unit	300,000,000	APBD		300 Unit	600,000,000
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah unit Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Tenggarong	100 Unit	150,000,000	APBD		300 Unit	450,000,000
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah dokumen Investigasi Kejadian Kebakaran		1 Dokumen	150,000,000			3 Dokumen	350,000,000
1.05.04.2.03.01	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Jumlah dokumen Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian	Tenggarong	1 Dokumen	150,000,000	APBD		3 Dokumen	350,000,000

		dan pengujian penyebab kejadian kebakaran							
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Jumlah laporan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia		4 Dokumen	1,500,000,000			16 Dokumen	3,060,000,000
1.05.04.2.05.03	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Jumlah Laporan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Tenggarong	12 Laporan	100,000,000	SPM	-	36 Laporan	300,000,000

1.05.04.2.05.04	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah laporan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Tenggarong	225 Laporan	300,000,000	SPM		525 Laporan	600,000,000
1.05.04.2.05.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah dokumen Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Tenggarong	3 Dokumen	100,000,000	SPM		12 Dokumen	160,000,000
1.05.04.2.05.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan	Tenggarong	30 Unit	1,000,000,000	SPM		60 Unit	2,000,000,000

		Evakuasi							
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Jumlah dokumen Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran		27 Dokumen	2,080,000,000			27 Dokumen	7,320,000,000
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Jumlah warga Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Tenggarong	10 Kelompok	750,000,000	SPM		40 Kelompok	3,000,000,000
1.05.04.2.04.02	Pembentukkan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Jumlah peserta Pembentukkan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Tenggarong	74 Kelompok	830,000,000	SPM		237 Kelompok	3,320,000,000
1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan masyarakat/ relawan pemadam kebakaran	Jumlah dokumen Dukungan Pemberdayaan masyarakat/ relawan pemadam	Tenggarong	25 Dokumen	500,000,000	SPM		49 Dokumen	1,000,000,000

	melalui penyediaan sarana dan prasarana	kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana							
TOTAL					92,408,036,428	-			204,934,489,184

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatanyang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025, serta merupakan kesinambungan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.1. Catatan Penting

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada tahun 2025. Yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika. Sedangkan apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai KartanegaraTahun 2021-2026.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja (Renja) PD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan didukung oleh seluruh *stakeholders* termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
4. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Pokok dan Unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaannya;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJMD, Pelaksanaan RPJMD, Pengawasan pelaksanaan RPJMD, serta evaluasi pelaksanaan RPJMD;

6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah; Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dilakukan pada tahun kedua dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indicator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indicator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara secara sendiri (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka *clean government* and *good governance* (Dunia Usaha, Masyarakat dan Pemerintahan).

4.3. Rencana TindakLanjut.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 berlaku sejak tanggal di tetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

gg.RENJA SEKRETARIAT DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai kartanegara merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten. Sekretaris Daerah untuk kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati. Sekretariat Daerah KabupatenKutai kartanegara terdiri atas 3 Asisten; di mana Asisten masing-masing terdiri dari sebanyak- banyaknya 4 bagian dan setiap bagian terdiri dari 3 Sub bagian dibawahnya.

Rancangan Rencana Kerja adalah dokumen perncanaan OPD untuk tahun 2025 disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025 dan selanjutnya dokumen perencanaan tersebut akan menjadi panduan dalam merencanakan kinerja tahunan yang akan disajikan dalam Rencana Kerja pada tahun berjalan.

Rancangan Rencana Kerja OPD merupakan Bentuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja OPD untuk tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian terdapat keterkaitan yang sangat erat antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah KabupatenKutai Kartanegara mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RANCANGAN AWAL RENJA-PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) dan sesuai arahan operasional dalam RencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD).
2. RANCANGAN RENJA-PD merupakan acuan bagi PD dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) pada APBD Tahun 2024.
3. RANCANGAN AKHIR RENJA-PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT)sebagai wujud dari kinerja PD

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8 Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9 Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

13 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

15 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Akhri Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 adalah :

1. Untuk menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahunan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.
2. Dijadikan sebagai salah satu instrumen acuan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada APBD Tahun 2025.
3. Sebagai parameter untuk lebih meningkatkan kinerja program, Kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam tahun anggaran berjalan.

1.4 Sistematika Penulisan

Naskah Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telahaan terhadap kebijakan nasional dan provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA_PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_Sekretariat Tahun Lalu Dan CapaianRenstra PD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Sekretariat tahun 2023 melalui analisis terhadap realisasi kinerja output fisik dan realisasi keuangan. Sedangkan Pencapaian kinerja output Renja tahun berjalan (2024) akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang diharapkandan pencapaian kinerja keuangan akan menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran output.

Evaluasi ini selnjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dapat diketahui pada Program dan Kegiatan yang terealisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024. Diantaranya:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak mernenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   Secara umum seluruh program dan kegiatan dilingkungan secretariat Daerah dapat terlaksana dengan baik sesuai target yang direncanakan, dan tidak terdapat program ataupun kegiatan yang tidak tercapai targetnya di akhir tahun, jika ada beberapa sub kegiatan yang realisasi keuanganya rendah dikarenakan ada efisiensi penggunaan anggaran, namun target fisik dapat tercapai sesuai target.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   Beberapa Program kegiatan yang realiasasi nya memperoleh Predikat tinggi atau sangat tinggi diantaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Program Perekonomian dan Pembangunan.

3. Realisasi program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;

   Dari seluruh program dan kegiatan di lingkungan skretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tidak terdapat program / kegiatan yang realisasinya diatas 100 % pada tahun 2023.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

   Secara umum tidak terdapat program/ kegiatan yang tidak tercapai pada tahun anggaran 2023 sehingga tidak terdapat faktor atau perihal yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kinerja.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

   Secara umum target kinerja Perangkat daerah dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan implikasi yang dihasilkan adalah meningkatnya Kulaitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di buktikan dengan tingginya nilai Indeks Kualitas Pelayanan Masyarakat oleh bagian pada Sekretariat daerah baik secara internal mapun eksternal. Implikasi lainya adalah peningkatan efektifitas koordinas dan peningkatan kualitas Kebijakan yang dihasilkan oleh Sekretariat Daerah sehingga diharapakan dari peningkatan tersebut dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diantaranya adalah intensitas kegiatan meningkat secara signifikan, upayan lainya adalah peningkatan upaya inovasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan kondisi dan situasi pandemi.

T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2023 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2024	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			262.410.000	238.624.098				
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	10	3	75,000,000	64.479.164	85.97	3	7	30%

						Daerah								
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	2	30,000,000	29.724.000	99.08	2	8	20%
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	2	157,410,000.00	144.420.934	91.75	3	12	20%
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15		66.523.806.369	62.850.688.361				

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2024	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*

4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	634	0	59.593.801.009	56.084.954.901	94.11	634	-	100%
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	12	100.684.400	98.695.320	98.02	12	-	20%
4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60	12	335.709.000	301.529.611	89.82	12	-	20%
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1	50.000.000	44.310.485	88.62	1	4	20%
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	1	521.800.000	502.473.520	96.30	1	4	20%
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	1	50.000.000	47.576.500	95.15	1	4	20%
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			898.213.600	808.211.220				
4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	400	13	78.840.000	56.984.400	72.78	80	320	20%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2024	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	1	126.284.600	114.409.600	90.60	1	4	20%
4	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5	1	60.000.000	48.881.600	81.47	1	4	20%
4	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	1	142,660,000	116.260.000	81.49	1	4	20%
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	1	490.429.000	471.675.620	96.18	1	4	20%
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			7.292.899.000	7.253.432.265				

					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	3300	3300	6.897.899.000	6.877.192.800	99.70			
4	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	1	395.000.000	376.239.465	95.25	1	4	20%
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			9.928.556.000	9.819.285.164				
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1305	261	1.433.512.000	1.412.268.700	98.52	261	1,044	20%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2024	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34360	17110	6.525.000.000	6.518.039.950	99.89	20000	14,360	58%

4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	255	51	308.344.000	303.574.620	98.45	60	195	24%
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2367	2265	1.200.000.000	1.199.071.594	99.92	2265	102	96%
4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	634	634	461.700.000	386.330.300	83.68	634	-	100%
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	510		36.555.106.029	36.072.779.332				
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	70	14	17.340.157.320	17.058.746.292	98.38	14	(4.00)	20%
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	500	100	19.214.948.709	19.014.033.040	98.95	100	400	20%
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Bag. Umum & Bag. Perencanaan Dan Keuangan)	12		17.666.881.160	17.364.807.436				

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub	Indikator Kinerja Capaian	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Kinerja Program dan	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)	

					Kegiatan	Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Renstra PD Tahun 2021-2026	Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Kegiatan renja PD Tahun 2024	Target Renja PD Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	12	45,000,000	43.648.500	97.00	12	-	20%
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	8.700.000.000	8.527.545.139	98.02	12	-	20%
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	12	3.050.069.200	3.022.465.773	99.09	12	-	20%
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	5.871.811.960	5.771.148.024	98.29	12	-	20%
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	132	222	30.371.596.925	28.636.661.789				
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67	35	2.233.462.348	2.111.413.810	94.54	35	-	50%

4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45	9	24.601.140.070	23.064.545.560	93.75	9	-	20%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2024	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40	8	2.231.556.513	2.166.804.219	97.10	8	-	20%
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	340	170	1.305.437.994	1.293.898.200	99.12	170	-	50%

4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	26	1.418.153.965	1.011.187.135				
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	120	24	918,153,965	770.038.180	83.87	12	-	20%
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10	2	500.000.000	241.148.955	48.23	2	-	20%
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	1165	1128	2.695.778.200	2.512.408.662				
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	15	3	550,000,000	544.851.210	99.06	3	-	20%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2024	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*

4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20	4	400.000.000	365.342.051	91.34	4	-	20%
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5	1	991.690.000	930.914.308	93.87	1	-	20%
4	01	01	2.13	04	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6	0	400.000.000	338.335.995	84.58	2	4	33%
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2	2	354.088.200	332.965.098	94.03	2	-	100%
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5282	10239	18.628.512.191	18.487.569.709				
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1000	1000	7.163.744.005	7.161.443.962	99.97	1000	-	100%
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	320	322	8.884.630.900	8.785.121.773	98.88	332	(3,012)	41%
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	950	950	2.580.137.286	2.541.003.974	91.31	1000	4,898	105%
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub	Indikator Kinerja Capaian	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Kinerja Program dan	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)	

					Kegiatan	Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Renstra PD Tahun 2021-2026	Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Kegiatan renja PD Tahun 2024	Target Renja PD Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	166	71	1.716.646.245	1.591.041.320				
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	75	15	567.176.000	517.868.119	91.31	113	-	20%
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	60	12	555.860.245	538.331.555	96.85	12	-	20%
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	15	3	593.610.000	534.841.646	90.10	3	12	20%
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahtraan Rakyat	Jumlah Orang/ Lembaga Penerima Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1820	1812	106.138.867.746	100.461.347.724				
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	250	50	79.901.151.043	75.802.111.331	94.87	50	(118)	26%

4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan	160	16	762.000.000	487.915.064	64.03	19	18	20%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2024	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB								

	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5568	1195	25.475.716.703	24.171.321.329	94.88	1262	-	20%
4	01	02	2,03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Regulasi hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	212	212	1.383.477.000	1.021.866.782				
4	01	02	2,03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1000	200	500.000.000	339.297.200	67.86	200	-	20%
4	01	02	2,03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20	4	708.477.000	544.005.600	76.79	10	-	20%
4	01	02	2,03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	10	2	175,000,000	138.563.982	79.18	6	(4)	20%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2024	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun	Tingkat Capaian Realisa

							s/d tahun 2022					2024	si Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4	01	02	2,04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah	19	25	1.507.560.900	1.499.933.888				
4	01	02	2,04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	60	17	450,000,000	449.898.379	99.98	12	-	20%
4	01	02	2,04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5	1	528.514.000	523.249.439	99.00	2	(1)	20%
4	01	02	2,04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	30	7	529.046.900	526.786.070	99.87	6	-	20%
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	185	22	1.889.741.000	1.543.869.308				
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	15	3	440.000.000	361.831.300	82.23	3	-	20%
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	75	15	642.026.000	534.051.928	83.18	15	-	20%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2024	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	120	4	807.715.000	647.986.080	80.22	120	-	20%
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	155	122	1.641.460.385	1.417.962.812				
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	110	22	750.360.000	595.762.141	79.40	22	-	26%
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	25	5	631.350.385	569.974.237	90.28	5	-	20%

4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	210	42	259.750.000	252.226.434	97.10	42	-	20%
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	763	684	2.563.600.000	2.546.430.784				
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2500	555	716,200,000	706.667.537	98.67	594	-	24%
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	10	2	1.022,400,000	1.016.707.458	99.44	4	(3)	20%
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50	10	825,000,000	823.055.789	99.76	10	-	20%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2024	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*

4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	27	27	1.097.000.000	1.080.674.000				
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	75	15	499,000,000	491.075.500	98.41	15	-	20%
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	30	6	374.000.000	365.701.000	97.78	6	-	20%
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	30	6	224.000.000	223.897.500	99.95	6	-	20%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, pengkoordinasian penyusunan kebijaksanaan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas PD, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi daerah, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan pelayanan, dengan indikator kinerja pelayanan yang telah disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, yang dituangkan kedalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026.

Pada tahun 2023 penilaian terhadap capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel TC. 30, adapun pencapaian kinerja pelayanan pada Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2024 masih dalam tahapan pelaksanaan sehingga belum bisa dilakukan penilaian terhadap indikator indikator tersebut, sedangkan proyeksi untuk Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat

DaerahKabupaten Kutai Kartanegara

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
I	I Indeks kualitas manajemen kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi			67.04	69.90	72.76	75.41	N.A	85.95	72.76	75.41	
	1 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan			n.a	88	89	90	N.A	88.14	89	90	
	2 Efektifitas koordinasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan			65	70	75	80	N.A	85.1	75	80	
	3 Indeks kualitas pelayanan administrasi											

	bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan			86	91	96	97	N.A	91.45	96	97	

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
	1 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama			92	94	96	97	N.A	94	96	97	
	2 Efektifitas koordinasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama			77	78	79	81	N.A	79.667	79	81	
	3 Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama			86	87	88	89	N.A	87	88	89	
	4 Nilai LPPD			3.3	3.4	3.5	3.6	N.A	0	3.5	3.6	Tidak Dilakukan Penilaian oleh Kemendagri
	1 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang											

	perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan SDA			81.7	84.7	89.7	91.7	N.A	86.63	89.7	91.7	

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
	2 Efektifitas koordinasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan SDA			65.5	68.5	70.5	75.5	N.A	74.5	70.5	75.5	
	3 Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan SDA			77	80	82	85	N.A	87.04	82	85	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk antisipasi terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara garis besar, untuk mewujudkan program pembangunan pemerintah dan untuk mencapai indikator kinerja, meningkatnya pengawasan pelaksanaan Good Governance dalam upaya mendukung visi dan misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026.

1. Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD. Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 memperoleh hasil yang memuaskan dengan tercapainya semua target yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran. Realisasi Anggaran Tahun 2023 mencapai 88,2 % dengan Realisasi Fisik Sebesar 98.2%, hal ini menggambarkan bahwa Kinerja Sekretariat Daerah dalam katagori Sangat Tinggi.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD adalah
    a. Data dan Informasi tidak tersedia dengan lengkap dan aktual,
    b. Penetapan program dan kegiatan/sub kegiatan cenderung di dasarkan atas kebiasaan masa sebelumnya (Business As Usual), atau minim inovasi;
    c. Kolaborasi dan Integrasi Kegiatan/Sub Kegiatan belum terbangun dengan baik;
    d. Perencanaan yang tidak fokus, cenderung terbagi rata di masing-masing Pejabat Struktural;
    e. Kurangnya sarana dan prasarana, profesionalitas aparat pelaksana dan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dibidang administrasi birokrasi pemerintah daerah;
    f. Etika dan moral penyelenggara pemerintahan daerah belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan tugas dan

fungsi yang diembannya;

g. Perubahan Struktur PD karena aturan baru Pemerintah Pusat, berakibat perubahan personalia seperti mutasi maupun pengurangan atau penambahan tupoksi baru yang juga memerlukan adaptasi baru bagi seluruh personalia PD;

h. Dinamisnya produk hukum dan perundang-undangan memerlukan kajian dan analisa bagi setiap pemerintah daerah dalam penerapan dan pelaksanaannya pada masing-masing daerah sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dan konflik dimasyarakat.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals). Pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara serta akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian visi dan misi secara nasional. Terdapat dua permasalahan yang memberikan dapak negatif terhadap pencapaian Visi Misi Kepala Daerah hal ini tergambar dalam proses pencapaianpemberian Beasiswa bagi 1000 guru yang menjadi tupoksi bagi Kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah. Akurasi data Guru yang bisa diberikan bea siawa belum tersedia dengan baik, jumlah target lebih besar dari kondisi riil dilapangan akibatnya realisai kegiatan ini tidak dapat mencapai target maksimal, bukan karena tidak tersedia anggaran tetapi lebih karena tidak terdapat sasaran yang sesuai dengan yang diprogramkan. Kedua pencapaian target kegiatan bantuan sosial dan hibah bidang keagamaan,dimana masih rendah nya tingkat pemenuhan persyaratan yang diwajibkan bagi penerima Bansos dan Hibah menjadi penyebab bantuan tidak dapat tersalurkan kepada calon penerima secara menyeluruh sesuai targe yang telah ditetapkan.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, yaitu;

a. Peningkatan sarana dan prasarana, profesionalitas aparat pelaksana dan perlunya peningkatan pemahaman

masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dibidang administrasi birokrasi pemerintah daerah;

b. Etika dan moral penyelenggara pemerintahan daerah belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan tugas dan fungsi yang diembannya;

c. Belum maksimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga pelayanan dianggap masih belum sesuai harapan masyarakat;

d. Dinamisnya produk hukum dan perundang-undangan memerlukan kajian dan analisa bagi setiap pemerintah daerah dalam penerapan dan pelaksanaannya pada masing-masing daerah sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dan konflik dimasyarakat.

5. Peluang dalam peningkatan pelayanan PD, antara lain :

a. Tahun 2025 ditekankan pada penguatan dan perbaikan pola kerja Pola kerja efektif dan efsisien dengan mengoptimalkan teknologi informasi sebagai media koordinasi dan komunikasi yang transparan dan bertanggung jawab

b. Adanya upaya peningkatan sarana dan prasarana, profesionalitas aparat pelaksana dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dibidang administrasi birokrasi pemerintah daerah melalui sosialisasi yang continyu;

c. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah terutama penyediaan sistem aplikasi yang terintegrasi dilingkungan Pemerintah Daerah, sehingga dalam penyusunan segala bentuk pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara umum dan oleh Sekretariat Daerah secara khusus dapat berjalan maksimal;

d. Adanya Pelatihan/Bimtek terhadap aparatur terkait peningkatan IQ dan perbaikan ESQ, agar etika dan moral penyelenggara pemerintahan daerah mengalami peningkatan agar mampu menjawab tuntutan tugas dan fungsi yang diembannya, serta memaksimalkan pelaksanaan Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah melalui SPIP yang melekat, sehingga peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dapat dicapai;

e. Adanya kajian dan analisa yang cermat bagi setiap PD teknis dalam menyikapi perubahan produk hukum dan perundang- undangan yang dinamis, terutama menyangkut beberapa kewenangan yang tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten.

6. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program kegiatan prioritas tahun direncanakan. Dari isu-isu penting tersebut diatas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

Tema Pembangunan RPJMD yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah "PEMANTAPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK AKSELERASI DAN TRANSFORMASI PEMBANGUNAN",

hal hal yang menjadi sasaran kegiatan diantaranya:

a. Peningkatan Jangkauan dan Kulitas Layanan Publik.
   1) Penataan Manajemen Organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah.
   2) Penataan manajemen keuangan dan asset daerah
   3) Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan public yang lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu berbasis IT.

b. Penguatan Sektor Unggulan

   Peningkatan produktifitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

c. Peningkatan Kualitas hidup masyarakat
   1) Peningkatan jangkauan dan akses layanan Pendidikan dan Kesehatan yang bermutu.
   2) Penguatan modal sosial budaya, solidaritas social dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan.
   3) Peningkatan ketrampilan perempuan dan pemenuhan hak hak anak.

d. Peningkatan Layanan Dasar dan Perumahan

   Penyediaan dan penataan perumahan dan pemukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman.

e. Penguatan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi kewilayahan

   1) Percepatan pembangunan desa sebagaibasis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat.
   2) Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan Kawasan strategis daerah.

Tugas dan fungsi perangkat daerah seecara umum dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD tersebut di tahun 2025 diharapkan untuk mampu melaksanakan point penting sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja mandatory sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Visi-Misi dan Program Dedikasi Kukar Idaman
3. Penyelesaian kegiatan-kegiatan yang belum tuntas.
4. Dukungan pada kebijakan nasional dan provinsi.
5. Penyediaan Data dan Informasi pembangunan yang valid dan aktual
6. Penyusunan RKPD tepat waktu dan tepat subtansi

Menanggapai isu isu penting diatas Sekretariat Daerah sebagai perangakat daerah yang menjalankan fungsi Koordinasi, Penyusunan Kebijakan dan fungsi pelayanan administratif diharapkan mampu untuk :

1. Berperan dalam Penataan Manajemen Organisasi danpenguatan koordinasi perangkat daerah.
2. Peningkatan Kulitas Kebijakan yang disusun dan diberlakukan, serta,
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat, baik sebagai Perangkat Daerah yang memberikan Layanan Masyarakat secara langsung termasuk juga sebagai Koordinator dalam memastikan Pelayanan Pelayanan Pemerintah Daerah secara umum telah sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 maka dapat dijelaskan bahwa RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Selanjutnya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024. Adapun dalam penyusunannya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang terkait seperti RPJM Nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RPJMD dan RKP Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkankan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD.

Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah terciptanya sinkronisasi dan integrasi Program/Kegiatan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk PD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana menyebutkan bahwa program prioritaspembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang di rencanakan. Memperhatikan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi serta berdasarkan identifikasipermasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan perkiraan kondisi tahun 2024 serta prospek tahun 2025 yang didasarkan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2021-2026 maka prioritas dan sasaran pembangunan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 di tetapkan sebagai berikut dengan beberapa catatan penting

diantaranya :

1. Penyesuaian anggaran Gaji dari BPKAD yang didasarkan pada hasil rekonsiliasi gaji tahun berjalan dan proyeksi kebutuhan pemenuhan gaji ASN dilingkungan Sekretariat Daerah untuk tahun 2025.
2. Diperlukanya penganggaran Medical cek up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena belum teranggarkan dalam Renstra PD tahun 2021-2026.
3. Penyesuaian kebutuhan anggaran pada bagian Kesejahteraan Rakyat Dalam melaksankan tupoksi masing masing sub kegiatan.

Selanjutnya Review terhadap Rancangan RKPD Sekretariat Daerah tahun 2025 dapat tergambar dalam matrik berikut:

Tabel T.C 31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*		*11*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	195,800,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	650.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	75,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	450,000,000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	50,000,000	
Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	90,800,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	150.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang	15 Laporan	60,737,167,163	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan	71.461.474.252	

		akuntabel								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	634 Orang/ Bulan	59,827,312,763	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	550 Orang / Bulan	70.601.619.852	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	100,684,400	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	100,684,400	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	187,370,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	187,370,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25,000,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	1 Laporan	521,800,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semest eran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emest eran SKPD	1 Laporan	521.800.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	50,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat	84 Dokumen	492,950,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	6 Dokumen	316.450.000	

		Daerah								
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	80 Dokumen	78,840,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	25.000.000	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	60,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	60.000.000	
Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	60,000,000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000.000	

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	142,660,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	151,450,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	151.450.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	45,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	45,000,000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	45,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	45,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	5,457,177,500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	5.356.550.000	
Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Penting
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	261 Paket	1,140,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	261 Paket	1,140,000,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34360 Paket	2,860,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34360 Paket	2.860.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	51 paket	225,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	51 paket	225.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12401 Dokumen	100,627,500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12401 Dokumen	0	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2367 Laporan	1,000,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2367 Laporan	1.000.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis	Kab. Kutai Kartanegar	Jumlah Dokumen	634 Dokumen	131,550,000	Penatausahaan Arsip Dinamis	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	634 Dokumen	131.550.000	

pada SKPD	a	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			pada SKPD		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102 Unit	2,165,047,510	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102 Unit	2.165.047.510,	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	1,516,469,320	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	1.516.469.320,	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit	648,578,190	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit	648,578,190	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	15,863,488,584	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	19.554.501.160	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	45,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	45,000,000	
Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7,000,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.634.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,953,689,200	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.953.689.200	

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,864,799,384	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.921.811.960	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Barang Milik Daerah	132 Unit	6,338,704,778	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Barang Milik Daerah	132 Unit	6.939.332.278	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67 Unit	812,172,348	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67 Unit	1.312.172.348	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	16 Unit	3,224,968,250	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	3.224.968.250,	

Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Penting
		Dipelihara/ Direhabilitasi								
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	15 Unit	1,401,564,180	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	1.401.564.180	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	340 Unit	900,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	340 Unit	1.000.627.500,	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	918,153,965	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2.026.463.814	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah	24 Orang / Bulan	918,153,965	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang / Bulan	1.026.463.814	

		dan Wakil Kepala Daerah								
Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	-	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	1.000.000.000	Belum terangg ar kan di Renstra
Penataan Organisasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	12 Dokumen	2,946,620,000	Penataan Organisasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	12 Dokumen	2,946,620,000	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	550,000,000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	550,000,000	

Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 laporan	400,000,000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 laporan	400,000,000	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	1,196,620,000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	1,196,620,000	
Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	400,000,000	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	400,000,000	
Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan	2 Dokumen	400,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah	2 Dokumen	400,000,000	

		Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					Daerah			
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Kegiatan	11,939,561,750	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Kegiatan	20.081.496.536	
Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 laporan	4,208,197,350	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 laporan	6.686.728.350	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 laporan	6,674,364,400	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 laporan	10.814.630.900	
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 laporan	1,057,000,000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 laporan	2.580.137.286	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Kutai Kartanegara				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Kutai Kartanegara				
Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	8 Dokumen	1,024,912,245	Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	8 Dokumen	2.105.048.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	418,600,000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	593.600.000	
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	355,162,245	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	550.000.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	251,150,000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	961.448.000	
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahtraan Rakyat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang/ Lembaga Penerima Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	179 Dokumen	30,831,198,203	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahtraan Rakyat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang/ Lembaga Penerima Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	179 Dokumen	39.824.724.703	

Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	168 Dokumen	19,804,473,500	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 Dokumen	27.560.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	4 Dokumen	62,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	800.000.000	

		Pengendalian Penduduk dan KB								
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan,	7 Dokumen	10,964,724,703	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7 Dokumen	10,964,724,703	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Kearsipan, Trantibum Linmas								
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Orang	0	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Orang	250.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100 Orang	0	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100 Orang	250.000.000	
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Regulasi hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	562 Dokumen	1,025,008,000	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Regulasi hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	562 Dokumen	1.175.000.000	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	500,008,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	550.000.000	

Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	6 Kasus	350,000,000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	6 Kasus	450.000.000	
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2 Dokumen	175,000,000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2 Dokumen	175,000,000	
Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah	20 Dokumen	1,408,514,000	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah	20 Dokumen	1.608.514.000	
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	450,000,000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	542.000.000	
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	2 Dokumen	528,514,000	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	2 Dokumen	548.514.000	

Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	6 laporan	430,000,000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	6 laporan	518.000.000	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Dokumen	718,750,000	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Dokumen	1.721.250.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	Dokumen	340,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	590.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Pengelolaan BUMD dan BLUD								

Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	231,250,000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	531.250.000,00	
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	147,500,000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	600.000.000	
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	14 Dokumen	656,100,385	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	14 Dokumen	1.841.100.385	
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	215,000,000	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	950.000.000	
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	281,350,385	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	631.350.385	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	159,750,000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	259.750.000	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	595 Dokumen	1,325,000,000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	595 Dokumen	3.454.000.000	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	500,000,000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1.754.000.000	
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara	Dokumen	300,000,000	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	900.000.000	

		Elektronik								
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	525,000,000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	800.000.000	
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	27 Dokumen	947,000,000	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	27 Dokumen	1.397.000.000	
Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	15	499,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	15	599.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan,	6	224,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	6	474.000.000	

		Statistik, Persandian								
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat	6	224,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat	6	324.000.000	
Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Penting
		dan Kawasan Permukiman, Pertanahan					dan Kawasan Permukiman, Pertanahan			
			Total	145,036,154,083				Total	184.669.572.638	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil kajian pengumpulan informasi dilapangan dan pengamatan maka disusun dan diusulkan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 meliputi 3 (lima) program yang dilaksanakan dalam 19 (Sembilan belas) kegiatan, dan 66 (enam puluh Enam) sub kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi PD Sekretariat Daerah yang tertuang dalam Renstra PD tahun 2021 – 2026, selain itu tidak terdapat Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku Kepentiangan baik dari Perangkat Daerah maupun dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan PD, untuk usulan Kegiatan dari masyarakat melalui SIPD belum dapat disajikan karena dalam tahap penyusunan Dokumen rancanagan Rencana Kerja (Ranwal Renja) Perangkat Daerah ini belum dilakukan penghimpunan Data usulan dari masyarakat, usulan melalui SIPD baru dibuka setelah Proses Musrenbang Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah selesai dilaksanakan.

Tabel TC. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	LOKASI			Indikator Kinerja	Vol	Catatan		
		RT	Kec	Kel			STATUS	REKOMENDASI MITRA	Rekomendasi Kecamatan
					NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan daerah untuk Tahun 2025 sebagai arahan bagi OPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun rencana. Untuk masing-masing prioritas pembangunan, selanjutnya dirumuskan tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai dengan fokus yang menyangkut prioritas program, serta rincian indikasi kegiatan prioritas.

Mempertimbangkan beberapa aspek dalam kebijakan pembangunan baik nasional maupun daerah, sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, maka penyusunan prioritas program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDGs, pertumbuhan ekonomi, Standar Pelayanan Minimal, Reformasi Birokrasi, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.
2. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
3. Korelasinya terhadap prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, serta permasalahan-permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan pada tahun rencana.
4. Korelasinya terhadap Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayahdan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
5. Korelasinya terhadap Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada pembangunan tahun 2025 ini merupakan tahun ketiga bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam merealisasikan RPJMD 2021-2026. Merujuk hal tersebut, RKPD Tahun 2025 ini memiliki arah pembangunan berdasarkan arahan pembangunan jangka menengah pada tema/fokus di tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2021-2026. Sebagai acuan pembangunan tahunan, akan

diadopsi rumusan kebijakan RPJMD di tahun kedua baik berupa sasaran, prioritas, dan program serta kegiatan, agar dalam pembangunan selanjutnya pemerintah daerah mempunyai pijakan langkah yang lebih kuat dan mampu menyelenggarakan pembangunan dengan optimal.

Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, rumusan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada setiap aspek pembangunan yang diharapkan memberikan dampak pada capaian target sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga mencapai sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Menindaklanjuti fokus pembangunan, pemerintah daerah harus mampu merumuskan sasaran tepat untuk mengantisipasi, mengatasi dan segala isu, permasalahan pembangunan daerah di tahun 2025. Berdasarkan arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan mengacu padaarah pembangunan tahun ke-V, maka tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 adalah: ““PEMANTAPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK AKSELERASI DAN TRANSFORMASI PEMBANGUNAN””

Berdasarkan tema pembangunan yang telah dirumuskan, maka terlihat pada tahun 2025 pembangunan Kutai Kartanegara diarahkan pada pengembangan dan pemerataan infrastruktur dasar, konektivitas serta peningkatan sumber daya manusia baik pada sektor kesehatan, pendidikan maupun kondisi sosial ekonomi lainnya.

Berdasarkan rumusan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, maka prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dijabarkan sebagai berikut:

a. Peningkatan Jangkauan dan Kulitas Layanan Publik.

- Penataan Manajemen Organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah.
- Penataan manajemen keuangan dan asset daerah
- Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan public yang lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu berbasis IT.

b. Penguatan Sektor Unggulan

- Peningkatan produktifitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

c. Peningkatan Kualitas hidup masyarakat

- Peningkatan jangkauan dan akses layanan Pendidikan dan Kesehatan yang bermutu.
- Penguatan modal sosial budaya, solidaritas social dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan.
- Peningkatan ketrampilan perempuan dan pemenuhan hak hak anak.

d. Peningkatan Layanan Dasar dan Perumahan

- Penyediaan dan penataan perumahan d an pemukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman.

e. Penguatan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi kewilayahan

- Percepatan pembangunan desa sebagaibasis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat.
- Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan Kawasan strategis daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja_PD

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah merupakan langkah strategis dalam perencanaan pembangunan yang akan mendasari penyusunan kinerja SKPD selama lima tahun. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai oleh SKPD. Pernyataan tujuan ini selanjutnya akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh SKPD. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah bahwa tujuan harus realistis dan dapat dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja

sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Dalam merumuskan sasaran yang perlu diperhatikan adalah:

1. Sasaran harus dapat menyatakan sebuah target yang terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik, dan sesuai dengan bidang layanan SKPD;
2. Indikator kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;
3. Kelompok sasaran yang dilayani;
4. Profil pelayanan terkait indikator kinerja;
5. Isu-isu strategis SKPD yang sesuai dengan bidang layanan SKPD; Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan;
6. Pencapaian satu tujuan dapat saja melalui beberapa sasaran; dan
7. Kriteria SMART-C yaitu:

a) *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
b) *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
c) *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
d) *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
e) *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
f) *continously improve* (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Mengacu pada Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara, dimana Sekretariat Daerah diharuskan untuk mencapai target Misi nomor satu pada RPJMD yaitu “Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani”, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya merumuskan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tahun 2021-2026 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas kebijakan, koordinasi dan pelayanan administratif.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama.

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam.

Sekretariat Daerah sebagai perangakat daerah yang menjalankan fungsi Koordinasi, Penyusunan Kebijakan dan fungsi pelayanan administratif diharapkan mampu untuk :

a. Berperan dalam Penataan Manajemen Organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah.
b. Peningkatan Kulitas Kebijakan yang disusun dan diberlakukan, serta,
c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat, baik sebagai Perangkat Daerah yang memberikan Layanan Masyarakat secara langsung termasuk juga sebagai Koordinator dalam memastikan Pelayanan Pelayanan Pemerintah Daerah secara umum telah sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih

   Sekrtariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diberikan kewenangan melaksanakan urusan wajib pemerintahan. Pelaksanaan kewenangan tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal, Misi Kepala Daerah yang dibebankan Kepada Sekrtariat Daerah diantaranya :

   a) Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani.
   b) Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya

2. Pencapaian SDGs

   Dalam hal pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan Sekretariat Daerah memiliki Peran untuk memastikan implementasi pelayanan publik dan indikator SDGs berjalan baik di tingkat kabupaten dan terkoordinasi dengan baik pada setiap perangkat daerah. Sekretariat daerah memiliki fungsi koordinatif, monitoring dan evaluasi atas pencapaian visi dan misi kepala daerah. Sejatinya keberhasilan tujuan SDGs membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi dan praktisi, serta organisasi masyarakat dan media Pengentasan Kemiskinan.Upaya pengentasan kemiskinan sesungguhnya tidak mungkin dibebankan kepada salah satu perangkat daerah saja Karenadari sisi kriteria kemiskinan sendiri terdapat beberapa bagian merupakan tanggung jawab instansi terkait lainya. Sekretariat daerah berfungsi lebih kepada upaya mengkoordinasikan seluruh stakeholder yang terkait dengan upaya penanganan kemiskinan di tingkat kabupaten.

3. Pencapaian SPM

SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang akan menjadi tolok ukur untuk digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sekaligus sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat, untuk itu pemerintah daerah diharapkan mampu menyelenggarakan urusan wajib secara lebih sesuai dengan yang ditetapkan dalam SPM masing-masing sesuai petunjuk Kementerian/Lembaga terkait dan dapat memprioritaskan pendanaan pelaksanaan daerah dalam belanja daerah dan wajib melaporkan penerapan SPM, karena hasil penerapan SPM akan digunakan untuk merumuskan kebijakan nasional dan sebagai pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif dengan mempertimbangkan keuangan negara.

Bagian dari NSPK

1. SPM adalah jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara.
2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara
3. Wujud dari upaya pemerataan hasil pembangunan daerah
4. Dalam bentuk program dan kegiatan pemda
5. Ditetapkan oleh Pusat dalam Peraturan Pemerintah
6. Juknis Pelaksanaannya dalam bentuk peraturan menteri, peraturan daerah, dan lainnya

Fungsi Sekretariat Daerah adalah memastikan bahwa seluruh perangkat daerah pengampu SPM dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta menghimpun laporan pelaksanaan SPM yang diampu oleh Perangkat Daerah terkait.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

1. Pada tahun anggaran 2025 Jumlah Program yang dilaksanakan Sekretariat Daerah sebanyak 3 Program dengan 19 kegiatan dan 67 Sub Kegiatan.
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretriat Daerah menyesuaikan jenis, target dan sasaran program maupun kegiatan, Lokasi

kegiatan bisa bersifat menyeluruh di diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif di tahun 2025 adalah sebesar Rp145,036,154,083, -

c. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2025 dan Perkiraan maju Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara.

T-C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode					Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1) Nilai SAKIP 2) Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Pimpinan 3) Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB dan A 4) PERSENTASE ASET YANG DI MANFAATKAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH			131,542,935,550				107,099,671,250

4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara	5	650,000,000			5	195,800,000
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara	2	450,000,000			2	75,000,000
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Kutai Kartanegara	1	50,000,000			1	30,000,000
4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara	2	150,000,000			2	90,800,000

4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Kab Kutai Kartanegara	577	71,461,474,252			577	60,737,167,163
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Kutai Kartanegara	550	70,601,619,852			550	59,827,312,763
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Kutai Kartanegara	12	100,684,400			12	100684400
4	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab Kutai Kartanegara	12	187,370,000			12	187,370,000
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Kutai Kartanegara	1	25,000,000			1	50,000,000
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab Kutai Kartanegara	1	521,800,000			1	521,800,000

4	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab Kutai Kartanegara	1	25,000,000			1	50,000,000
4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara	6	316,450,000			6	492,950,000
4	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab Kutai Kartanegara	2	25,000,000			2	78,840,000
4	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab Kutai Kartanegara	1	60,000,000			1	60,000,000
4	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab Kutai Kartanegara	1	50,000,000			1	60,000,000
4	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab Kutai Kartanegara	1	30,000,000			1	142,660,000
4	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab Kutai Kartanegara	1	151,450,000			1	151,450,000

4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kab Kutai Kartanegara	1	45,000,000			1	45,000,000
4	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab Kutai Kartanegara	1	45,000,000			1	45,000,000
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara	37674	5,356,550,000			37674	5,457,177,500
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Kutai Kartanegara	261	1,140,000,000			261	1,140,000,000
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab Kutai Kartanegara	34360	2,860,000,000			34360	2,860,000,000
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Kutai Kartanegara	51	225,000,000			51	225,000,000
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab Kutai Kartanegara	1254	-			1254	100,627,500
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Kutai Kartanegara	2368	1,000,000,000			2368	1,000,000,000
4	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Kutai Kartanegara	634	131,550,000			634	131,550,000
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang	Kab Kutai Kartanegar	12	2,165,047,510			12	2,165,047,510

					Pemerintah Daerah	urusan Pemerintah Daerah	a						
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab Kutai Kartanegara	2	1,516,469,320			2	1,516,469,320
4	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab Kutai Kartanegara	10	648,578,190			10	648,578,190
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kab Kutai Kartanegara	50	19,554,501,160			50	15,863,488,584
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Kutai Kartanegara	12	45,000,000			12	45,000,000
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Kutai Kartanegara	12	10,634,000,000			12	7,000,000,000

4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Kutai Kartanegara	14	2,953,689,200			14	2,953,689,200
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Kutai Kartanegara	12	5,921,811,960			12	5,864,799,384
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara	438	6,939,332,278			438	6,338,704,778
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab Kutai Kartanegara	67	1,312,172,348			67	812,172,348
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Kutai Kartanegara	16	3,224,968,250			16	3,224,968,250
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Kutai Kartanegara	15	1,401,564,180			15	1,401,564,180
4	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Kutai Kartanegara	340	1,000,627,500			340	900,000,000
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab Kutai Kartanegar	4	2,026,463,814			4	918,153,965

					Wakil Kepala Daerah		a						
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab Kutai Kartanegara	2	1,026,463,814			2	918,153,965
4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab Kutai Kartanegara	2	1,000,000,000			2	-
4	1	1	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	Kab Kutai Kartanegara	12	2,946,620,000			12	2,946,620,000
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab Kutai Kartanegara	4	550,000,000			4	550,000,000
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab Kutai Kartanegara	3	400,000,000			3	400,000,000

4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab Kutai Kartanegara	1	1,196,620,000			1	1,196,620,000
4	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab Kutai Kartanegara	2	400,000,000			2	400,000,000
4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab Kutai Kartanegara	2	400,000,000			2	400,000,000
4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab Kutai Kartanegara	12	20,081,496,536			12	11,939,561,750
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab Kutai Kartanegara	4	6,686,728,350			4	4,208,197,350
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab Kutai Kartanegara	4	10,814,630,900			4	6,969,744,400
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab Kutai Kartanegara	4	2,580,137,286			4	761,620,000
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1) Persentase kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti 2) Presentase Rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan			44,713,286,703				34,289,632,448

						3) Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP) 4) Presentase Kerjasama yang di tindak lanjuti							
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	Kab Kutai Kartanegara	8	2,105,048,000			8	1,024,912,245
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab Kutai Kartanegara	2	593,600,000			2	418,600,000
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab Kutai Kartanegara	3	550,000,000			3	355,162,245
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab Kutai Kartanegara	3	961,448,000			3	251,150,000

4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Orang/Lembaga Penerima Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab Kutai Kartanegara	219	39,824,724,703			219	30,831,198,203
4	1	2	2.02	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kab Kutai Kartanegara	100	250,000,000			100	0
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab Kutai Kartanegara	10	27,560,000,000			10	19,804,473,500
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab Kutai Kartanegara	3	800,000,000			3	62,000,000

4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kab Kutai Kartanegara	6	10,964,724,703			6	10,964,724,703
4	1	2	2.02	4	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kab Kutai Kartanegara	100	250,000,000			100	0
1	2	2			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab Kutai Kartanegara	455	1,175,000,000			455	1,025,008,000
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab Kutai Kartanegara	250	550,000,000			250	500,008,000

4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab Kutai Kartanegara	5	450,000,000			5	350,000,000
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab Kutai Kartanegara	200	175,000,000			200	175,000,000
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab Kutai Kartanegara	21	1,608,514,000			21	1,408,514,000
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab Kutai Kartanegara	13	542,000,000			13	550,000,000
4	1	2	2.04	2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab Kutai Kartanegara	2	548,514,000			2	608,514,000
4	1	2	2.04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab Kutai Kartanegara	6	518,000,000			6	250,000,000
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1) Persentase kebijakan di bidang ekonomi yang ditindaklanjuti 2) Persentase permasalahan kebijakan Administrasi pembangunan daerah yang diselesaikan 3) Persentase kebijakan Bidang SDA yang ditindaklanjuti 4) PERSENTASE			8,413,350,385				3,646,850,385

						PENGADAAN BARANG JASA YANG DI SELESAIKAN							
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab Kutai Kartanegara	13	1,721,250,000			13	718,750,000
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab Kutai Kartanegara	5	590,000,000			5	340,000,000
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab Kutai Kartanegara	4	531,250,000			4	231,250,000
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab Kutai Kartanegara	4	600,000,000			4	147,500,000
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab Kutai Kartanegara	20	1,841,100,385			20	656,100,385

4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kab Kutai Kartanegara	6	950,000,000			6	215,000,000
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab Kutai Kartanegara	7	631,350,385			7	281,350,385
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab Kutai Kartanegara	7	259,750,000			7	159,750,000
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab Kutai Kartanegara	904	3,454,000,000			220	1,325,000,000
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab Kutai Kartanegara	684	1,754,000,000				500,000,000
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab Kutai Kartanegara	2	900,000,000			2	300,000,000
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab Kutai Kartanegara	218	800,000,000			218	525,000,000
4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab Kutai Kartanegara	27	1,397,000,000			6	947,000,000

4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kab Kutai Kartanegara	15	599,000,000				499,000,000
4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kab Kutai Kartanegara	6	474,000,000			6	224,000,000

4	1	3	2.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kab Kutai Kartanegara	6	324,000,000				224,000,000
					TOTAL PAGU		184,669,572,638.00						145,036,154,083

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Akhir (RENJA) PD merupakan dokumenperencanaan OPD tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, proses penyusunan RKPDTahun 2025 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah.

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian ;
    1. Kebijakan belanja mandatori sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
    2. Visi-Misi dan Program Dedikasi Kukar Idaman.
    3. Penyelesaian kegiatan-kegiatan yang belum tuntas.
    4. Dukungan pada kebijakan nasional dan provinsi.
    5. Penyediaan Data dan Informasi pembangunan yang valid dan aktual
    6. Penyusunan RKPD tepat waktu dan tepat subtansi

b. Kaidah – kaidah pelaksanaan ;

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, merupakan pedoman bagi PD dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan.

    Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut :

    1. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan didukung oleh seluruh stakeholders termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, dengan sebaik- baiknya;
    2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;

3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026;
4. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) yang memuat, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Pokok dan Unggulan Pembangunan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program dan kegiatan beserta pendanaannya;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara, berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD), serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJMD, Pelaksanaan RPJMD, Pengawasan pelaksanaan RPJMD, serta evaluasi pelaksanaan RPJMD;
6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara, agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
7. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, dilakukan pada tahun kedua dan pada akhir masa jabatan Bupati Kepala Daerah, terhadap indikator kinerja misi. Sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dan kegiatan dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melalui survei yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Kutai

Kartanegara, secara sendiri (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka clean goverment and good governance (Dunia Usaha, Masyarakat dan Pemerintahan).

c. Rencana tindak lanjut ;

Tema Pembangunan RPJMD yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Desa dan Kecamatan Sekretariat Daerah sebagai perangakat daerah yang menjalankan fungsi Koordinasi, Penyusunan Kebijakan dan fungsi pelayanan administratif diharapkan mampu untuk membantu program Peningkatan Jangkauan dan Kulitas Layanan Publik melalui Penataan Manajemen Organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah dengan cara :

1. Berperan dalam Penataan Manajemen Organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah.
2. Peningkatan Kulitas Kebijakan yang disusun dan diberlakukan, serta,
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat, baik sebagaiPerangkat Daerah yang memberikan Layanan Masyarakat secara langsung termasuk juga sebagai Koordinator dalam memastikan Pelayanan Pelayanan Pemerintah Daerah secara umum telah sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Pada akhirnya Rancangan Rencana Kerja Akhir (RENJA) PD ini berisi perencanaan strategis yang bersifat operasional dalam menterjemahkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Ranwal Rencana Kerja (RENJA) PD nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi unit kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun rencana kerja tahunan yang ditandai dengan dituangkannya lokasi, sasaran dan indikator kinerja out put dan out come dari setiap kegiatan. Perencanaan strategis ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel, sehingga peningkatan kinerja individu, unit kerja dan organisasi dapat tercapai. Rencana Kerja Akhir (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus

dilakukan dengan memperhatikandan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Semoga Dokumen Rancangan Akhir Renja PD tahun 2025 ini dapat memberikan arahan yang jelas tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Dukungan dalam hal penganggaran sangat diharapkan sehingga capaian target yang telah ditentukan dapat terwujud.

RENJA SEKRETARIAT DEWAN

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum untuk penyusunan Rencana kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang selanjutnya akan disebut Renja Akhir. Undang – undang ini secara subtansi mengamanatkan penyusunan Rencanan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana kerja Akhir pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renja RKPD.

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Peran serta lembaga Sekretariat DPRD memiliki arti penting karena memfasilitasi lembaga DPRD melalui alat kelengkapannya agar senantiasa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara proporsional sebagai wujud dari fungsi sebagai perwakilan rakyat. Peran serta lembaga DPRD sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pada hakekatnya Otonomi Daerah adalah desentralisasi atau proses pendemokrasian pemerintah dengan keterlibatan langsung masyarakat melalui lembaga perwakilan, lembaga politik dan lembaga informal masyarakat karena pada intinya negara demokratis menyebutkan bahwa demokrasi pada arus lokal cukup memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan demokrasi pada tingkat nasional Pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional diarahkan untuk mengembangkan antar sektor mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, ideologi dan situasi kondusif daerah dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada pelaksanaan pembangunan RPJMD 2016-2021.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan secara teknis operasional yang bertugas memberikan pelayanan kepada DPRD dan berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, maka susunan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegar dalam pasal 3 terdiri dari:

a. Sekretaris DPRD
b. Kepala Bagian Umum, membawahkan :
1. Sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
c. Kepala Bagian Program dan Keuangan, membawahkan :
d. Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan :
e. Kepala Bagian Persidangan dan Perundangan membawahkan :
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan struktur Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat digambarkan seperti dibawah ini :

STRUKTUR ORGANISSASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

TUGAS

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

FUNGSI

a. Memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. Memberikan dukungan administrasi perencanaan dan keuangan DPRD;
c. Menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi; dan
d. Menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan funsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan

Sekretaris Dewan mempunyai tugas:

a. Membantu Kepala Daerah secara administrasi sesuai dengan Bidang tugasnya melalui Sekretaris Daerah;
b. Membantu dan bertanggung jawab secara operasional terhadap pimpinan DPRD;
c. Mengkoordinasikan, memfasilitasi pelayanan secara operasional terhadap DPRD;
d. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan bawahannya;
e. Mengkoordinasikan, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan urusan Sekretariat DPRD;
f. Merumuskan konsep sasaran, menyusun kebijakan teknis di Bagian Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;

h. Membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi terkait dan organisasi perangkat daerah lainnya yang menyangkut Bidang tugasnya;
i. Merumuskan kegiatan sekretariat DPRD yang meliputi Bagian Tata Usaha, Umum dan Perlengkapan, Keuangan dan Persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
j. Merumuskan sasaran penyusunan RENSTRA Sekretariat DPRD;
k. Mengorganisasikan penyusunan RENJA Tahunan Sekretariat DPRD;
l. Mengkoordinasikan penyusunan TAPKIN dan LAKIP Sekretariat, melaporkan kepada kepala Daerah secara berkala melalui Sekretaris Daerah ke bagian Administrasi Organisasi;
m. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
n. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
o. Mengkoordinasikan penyusunan program Sekretariat DPRD dengan memberikan arahan kepada kapala bagian mengacu pada RPJPD,
p. RPJMD, RKPD, Rencana Strategis Kabupaten, Kebijakan Bupati, dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku;
q. Merumuskan rencana strategis kebijakan operasional Sekretariat DPRD;
r. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
s. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mendokumentasikan kegiatan DPRD;
t. Monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategis kebijakan operasional Sekretariat DPRD;
u. Menyusun dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Sekretariat DPRD;

Rencana Kerja PD merupakan suatu proses mempersiapkan kegiatan yang akan dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai suatu tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.yang telah ditentukan organisasi dan bisa dipertanggungjawabkan. dalam 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai langkah , kegiatan melalui penetapan indikator kinerja Rencana Kerja PD merupakan salah satu evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi, mengetahuisejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara selaras dengan programdan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) adalah target dari capaian indikator kinerja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah:

Landasan hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Perencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. eputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025;
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum, dan program pembangunan daerah, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun berjalan. Penyusunan Renja juga untuk menerjemahkan Rentra

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ialah sebagai sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan tahun anggaran 2025 yang meliputi gambaran program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan beserta target kinerjanya yang akan dicapai pada tahun 2025
2. Mengevaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan
4. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap tugas dan fungsi

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja PD agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahani dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja-PD, keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra-PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Organisasi Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja-PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2/2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2025), mengacu pada APBD tahun berjalan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkanrealisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan Realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan realisasi APBD untuk Sekretariat DPRD kabupaten Kutai Kartanegara. Pokok-pokok materi yang disajikan bab ini :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerjahasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerjahasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerjahasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya ataumelebihi target kinerja program /kegiatan.
5. Implementasi yang timbul terhadap target capaian program RenstraPD.
6. Kebijakan atau tidaknya perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatsi faktor-faktor penyebab tersebut.
7. Tabel Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan pencapaian Renstra PD Tahun Berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun

terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Pada bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:

1. Tingkat kinerja pelayanan PD
2. Permasalahan dan Hambatanyang dihadapi dalam penyelenggaraantugas dan fungsi PD
3. Dampaknya terhadap capaian program nasional
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD
5. Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang Strategis dalam program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Proses membandingkan antara rancangan RKPD/Renstra PD (tahun 2022).
2. Penjelasan mengenai proses
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan RKPD.
4. Melampirkan tabel Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraiakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD. Deskripsi yang disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu–isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
3. Tabel T-C.32 mengenai usulan program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PROGRAM KEGIATAN

4.1 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rencana akhir RKPD / Renstra baik jenis program/Kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
d. Tabel rencana program dan kegiatan

BAB V. PENUTUP

a. Catatan penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan Membahas Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya dan capaian indikator kinerja penilaian pencapaian target.

a. Kaidah-kaidah pelaksanaan

b. Rencana tindak lanjut.

BAB. II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sekarang ini dalam rangka memfasilitasi kegiatan- kegiatan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana kerja suatu PD adalah penjabaran perencanaan tahunan dari rencana strategis PD tersebut. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan tugas pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta memfasilitasi terwujudnya hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan Kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Dengan demikian maka sasaran yang diharapkan dari kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah meningkatnya pelaksanaan tugas-tugas pelayanan untuk mendukung meningkatnya kinerja DPRDdan terbinanya hubungan kerjasama yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah Daerah KabupatenKutai Kartanegara, Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja adalah suatu gambaran yang disampaikan melalui hasil evaluasi indikator- indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja tercapainya evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun lalu maksud yaitu (tahun n- 2/2023) dan pelaksanaan capaian tahun berjalan dalam tabel yang dimaksud (tahun n- 1/2024) yang mengacu pada APBD tahun berjalalan berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja

yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Adapun Evaluasi terhadap Capaian Program/Kegiatan Tahun 2023 sebagai Berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   Pada Tahun 2023 Program yang tidak memenuhi target kinerja adalah Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 77 (BB) tidak memenuhi target dengan realisasi nilai Sakip 77,56 (BB) dan tingkat realisasi 94%. Adapun sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja ialah sebagai berikut:

   a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

   - Kegiatan : Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

   Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD dengan targer 540 orang/bulan dapat terealisasi 526 orang/bulan (97%

   b. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

   - Kegiatan : Fasilitasi Tugas DPRD

   Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dengan target 96 Dokumen telah terealisasai 87 dokumen (84)

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   Program Dukungan pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu dengan target 100% dan terelalisasi 100%. Adapun secara umum skegiatan/sub kegiatan pada sekretariat DPRD telah memenuhi target kinerja

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   a. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

   - Kegiatan : Pembentuka Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

   Sub kegiatanPenyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah dengan target 10 Dokumen telah terealisasi 14 dokumen (140%)

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program /kegiatan :

- Faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja, penetapan anggaran kas sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan
- Adapun faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan yaitu tidak memenuhi target kinerja hsail/keluaran yang direncanakan waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana, Lokasi pelaksanaan berbeda dengan rencana, Lokasi bertambah/berkurang, Penerima manfaat bertambah/berkurang, dan aktu pelaksanaan kurang

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; Dengan adanya capaian program Renstra Perangkat Daerah maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terencana dan teranggarkan sehingga tata kelola pemerintahan yang baik bisa tercapai Kebijakan atau tidaknya perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatsi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur dalam hal perencanaan, pengggaran baik itu staf yang menangani perencanaan dan penggaran serta para pejabat esselon sehingga capaian target kinerja program/kegiatan lebih optimal Realisasi dan rekaspitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra akan disajikan dalam Tabel T-C.29 sebagai berikut;

Tabel T-C.29.

Rekapitulsi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD S/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra -PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
										Target Renja - PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2	1	2			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		85 (A)	73,34 (BB)	77 (BB) Nilai	72,56 (BB)	94%	79 (BB)		100%
4	2	1	2	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		60	12	12	12	100%	100%	100%	100%
4	2	1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	10	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokume	7 Dokumen	70%

						Daerah	Daerah						n		
4	2	1	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	60%
4	2	1	2	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
4	2	1	2	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	70%
4	2	1	2	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
4	2	1	2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100%	5 Laporan	9 Laporan	90%

4	2	1	2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	70%
4	2	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		30	6	6	6	100%	100%	100%	100%
4	2	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10.680	2,152 orang/ bulan	2232 Orang/ bulan	2232 Orang/ bulan	100%	165 Orang/ bulan	4549 Orang/ bulan	43%
4	2	1	2	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10	1 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	5 Dokumen	50%
4	2	1	2	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	36 Dokumen	60%
4	2	1	2	2	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	80%
4	2	1	2	2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	60%
4	2	1	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester a	90	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	54 Laporan	60%

							n SKPD								
4	2	1	2	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		5	1	1	1	100%	100%	100%	100%
4	2	1	2	3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	2	1	2	3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
4	2	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		20	4	4	4	100%	100%	100%	100%
4	2	1	2	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.555	311 Unit	4 Paket	4 Paket	100%	6 Paket	6 Paket	100%
4	2	1	2	5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						3 Dokumen	3 Dokumen	100%
4	2	1	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	250	50 orang	56 Orang	56 Orang	100%	168 Orang	274 Orang	110%

4	2	1	2	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	85		0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
4	2	1	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	20 orang	37 Orang	196 Orang	100%	20 Orang	77 Orang	77%
4	2	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah		30	6	6	6	100%	100%	100%	100%
4	2	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	100%	1Paket	1Paket	100%
4	2	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20.140	4028 Jenis	4 Paket	4 Paket	100%	1Paket	1Paket	100%
4	2	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47.520	9504 Porsi	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
4	2	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15.900	3180 Lembar	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
4	2	1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	191.760	76,704 eksemplar	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
4	2	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	1.090	186 Orang/Kali	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

4	2	1	2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	35	12 Berkas	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
4	2	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		6.945	1.389	1.389	1.389	100%	100%	100%	100%
4	2	1	2	7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Komponen Instralasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor				6 Unit	100%			
4	2	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				150 Unit	100%	150 Unit	408 Unit	100%
4	2	1	2	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.540	108 Unit	150 Unit	150 Unit	100%	150 Unit	408 Unit	100%
4	2	1	2	7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5.405	1081 Unit	250 Unit	250 Unit	100%	308 Unit	1639 Unit	100%
4	2	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		60	12	12	12	100%	100%	100%	100%
4	2	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	60%
4	2	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	37 Laporan	62%
4	2	1	2	8	4	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan	60	12 Bulan	12	12	100%	12	38	63%

						Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan			Laporan	Laporan		Laporan	Laporan	
4	2	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.920	793	793	793	100%	100%	100%	100%
4	2	1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	235	42 Unit	37 Unit	37 Unit	100%	37 Unit	116 Unit	49%
4	2	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	235	47 Unit	37 Unit	37 Unit	100%	37 Unit	121 Unit	51%
4	2	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	50 750	94 kali	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	114 Unit	100%
4	2	1	2	9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	750 1200	140 Kali/Unit	150 Unit	150 Unit	100%	150 Unit	440 Unit	100%
4	2	1	2	15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		10	2	2	2	100%	100%	100%	100%

4	2	1	2	15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	2.700	12 Bulan	540 Orang/Unit	526 Orang/Unit	97%	540 Orang/ bulan	540 Orang/ bulan	100%
4	2	1	2	15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2.600	140 stel	520 stell	520 paket	100%	520 Stel	520 Stel	100%
	2	1	2	15	3	Pelaksanaan Medical Check up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up DPRD*	225		45 orang	0 orang	0%	45 Orang	45 Orang	100%
4	2	1	2	16		Layanan Administrasi DPRD		15	3	3	3	100%	100%	100%	100%
4	2	1	2	16	1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	5	3 Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
4	2	1	2	16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.745	349 Rapat	250 Laporan	250 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4	2	1	2	16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	20	4 Rumah Tangga	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	12 Paket	60%
4	2	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	2	2	2	1		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan		80	13	16	11	69%	100%	100%	100%
						DPRD									
4	2	2	2	1	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	50	11 Rapat	10 Dokumen	14 Dokumen	140%	1 Dokumen	1 Dokumen	2%

4	2	2	2	1	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	120	9 Raperda	24 Dokumen	26 Dokumen	100%	15 Dokumen	15 Dokumen	100%
4	2	2	2	1	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	120	4 Raperda	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
4	2	2	2	1	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	40	5 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	100%	6 Dokumen	20 Dokumen	50%
4	2	2	2	1	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2	2	2	2		Pembahasan Kebijakan Anggaran		90	8	18	8	100%	100%	100%	100%
4	2	2	2	2	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	25	5 Rapat	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2	2	2	2	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	25	5 Rapat	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2	2	2	2	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	10	2 Rapat	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2	2	2	2	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	10	2 Rapat	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2	2	2	2	5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per	10	2 Rapat	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

							Semester								
4	2	2	2	2	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	10	2 Rapat	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2	2	2	3		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		950	254	21	18	86%	100%	100%	100%
4	2	2	2	3	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	180	3 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
4	2	2	2	3	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	180	3 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
4	2	2	2	3	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	180	3 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
4	2	2	2	3	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	180	3 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
							Perekonomian								
4	2	2	2	3	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	180	3 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%

4	2	2	2	3	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	20	1 Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2	2	2	3	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	20	0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2	2	2	3	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	10	2 Rapat	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2	2	2	4		Peningkatan Kapasitas DPRD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	2	2	2	4	1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	45					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2	2	2	4	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	225	30 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
4	2	2	2	4	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	75	15 Media	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	2	2	2	4	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	600	2 Laporan	132 Orang	132 Orang	100%	10 Orang	10 Orang	100%
4	2	2	2	4	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	35	12 Laporan	7 Orang	7 Orang	100%	7 Orang	7 Orang	100%

4	2	2	2	4	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5	1 Kegiatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2	2	2	4	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	5	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2	2	2	5		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	2	2	2	5	1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD			1 Laporan	1 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
4	2	2	2	5	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	10	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	5 Dokumen	50%
4	2	2	2	5	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	15	3 Kegiatan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	9 Dokumen	60%
4	2	2	2	6		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	2	2	2	6	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	5	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
4	2	2	2	6	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	50	3 Dokumen	10 Laporan	10 Laporan	100%	10 Laporan	23 Laporan	100%
4	2	2	2	6		Pembahasan Kerja Sama Daerah									
4	2	2	2	6	1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi						1 Dokumen	1 Dokumen	100%

							Persetujuan Kerja Sama Daerah								
4	2	2	2	8		Fasilitasi Tugas DPRD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	2	2	2	8	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	480	1 Dokumen	96 Dokumen	87 Dokumen	84%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
4	2	2	2	8	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	70	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
4	2	2	2	8	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	480	76 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Outcome atau indikator hasil tidak dianalisa pada evaluasi kinerja ini, mengingat diperlukannya periode penelitian yang lebih lama atau berkala untuk dapat melihat efektivitas kegiatan-kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya mencapai tujuan, visi dan misi daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Mengingat Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah mewujudkan pelayanan prima dalam menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dan Misi yang ditetapkan adalah membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang, mewujudkan hubungan kerjasama antara Pimpinan Dewan, Anggota Dewan dan Pemerintah Daerah serta meningkatkan pelayanan dan fasilitasi kegiatan rapat-rapat Dewan, maka sulit menentukan tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji. Namun demikian kami mencoba menentukan tolok ukur dan indikator kinerja pelayanan berdasarkan target capaian pada tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan berikut:

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator *)	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara	Ada / Tidak	Keputusan DPRD yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan x 100%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Analisis isu-isu strategis dari beberapa faktor yang telah dikemukakan sebelumnya, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni untuk memfasilitasi kegiatan DPRD dan mengkoordinasikan kegiatan DPRD dengan Pemerintah Daerah Berdasarkan gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Kajian terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dan Kajian terhadap Renstra maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apa bila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal, Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dimaksud memberikan panduan langkah-langkah kinerja yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menetapkan Indikator Kerja Utama pada berbagai tingkatan organisasi.

a. Peningkatan peran sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja DPRD yang akuntabel.
b. Peningkatan sistem, dan prosedur kerja yang efisien, efektif, sinergis dan akuntabel di tunjang sarana dan prasarana yang memadai.
c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.
d. Mendapatkan informasi kinerja dalam penyelenggaraan manajemen kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Karatanegara.
e. Mendapatkan ukuran keberhasilan dalam capaian suatu tujuan untuk perbaikan kinerja.

f. Serta keterkaitan antara kebijakan yang dilaksanakan dengan visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026Review terhadap Rancangan RKPD

Rancangan RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja PD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaian yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Apun dalam Penyusunan Ranhir Renja Sekretariat DPRD melakukan review terhadap rancangang RKPD dengan melakukan analisis kebutuhan dan ditemukan adanya beberapa yang harus disesuaikan baik target maupun pagu anggaran dikarenakan beberapa hal, anatara lain:

1. Rasionalisasi pagu, penyesuaian target, dan penambahan sub kegiatan untuk penyetaraan seluruh PD
2. Menggeser pagu anggaran pada beberapa sub kegiatan sesuai kebutuhan tahun 2025
3. Mengubah target capaian kinerja menyesuaikan kebutuhan tahun 2025
4. Penambahan sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas untuk Pimpinan DPRD Periode 2024-2029
5. Penambahan sub kegiatan Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah untuk mendukung kerja sama DPRD dengan instansi vertikal
6. Penambahan sub kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD untuk menghimpun dokumen laporan hasil kinerja AKD selama 3 (tiga) masa sidang

Disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Penjabaran dari review

rancangan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disajikan pada tabel T-C.31 berikut;

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	kab. Kutai Kartanegara		79 (BB)	74.751.059.139	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	kab. Kutai Kartanegara		79 (BB)	136.033.947.766	
	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	1.650.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	750.000.000	
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	250.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	450.000.000	mengubah target capaian kinerja
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2	250.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4	300.000.000	rasionalisasi pagu oleh bappeda

					Dokumen RKA-SKPD					Dokumen RKA-SKPD			
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1	200.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1	0	penyetaraan seluruh PD
					SKPD					SKPD			
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	250.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	0	penyetaraan seluruh PD
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	200.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	0	penyetaraan seluruh PD

		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	250.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	0	penyetaraa n seluruh PD
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	250.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	0	penyetaraa n seluruh PD
	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartan egara	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	6	20.676.470.758	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartan egara	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	6	82.122.609.385	
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.136	19.419.724.758	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.310	81.213.981.385	mengubah target capaian kinerja
		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	117.240.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	0	penyetaraa n seluruh PD

		10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	108.953.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	0	penyetaraa n seluruh PD
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	45.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	25.000.000	rasionalisa si pagu oleh bappeda
		12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	126.425.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	0	sub kegiatan arahan dari Bappeda
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18	858.628.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	14	858.628.000	

								Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	25.000.000	penambahan sub kegiatan
	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1	418.250.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1	105.000.000	
		14	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	164.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	25.000.000	rasionalisasi pagu oleh bappeda
								Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		50.000.000	penambahan sub kegiatan
		15	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1	254.250.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1	30.000.000	rasionalisasi pagu oleh bappeda
	4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	1.436.065.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	1.186.065.000	

		16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	311	500.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	400.000.000	menggeser pagu untuk sub kegiatan Pendataan dan Pengelolaa n Administra si Kepegawai an
		17						Pendataan dan Pengelolaan Administrasi	kab. Kutai Kartane	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	3	100.000.000	1. Absensi 2. DUK 3. KENPA 4.
								Kepegawaian	gara	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			KGB 5. Satya Lencana 6. LHKASN 7. LHKPN
		18	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	336.065.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	kab. Kutai Kartane gara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	168	336.065.000	mengubah target capaian kinerja

		19	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17	250.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	menggeser pagu anggaran untuk sub kegiatan Penyusuna n dan Pembahas an Program Pembentuk an Peraturan Daerah
		20	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	20	350.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	20	350.000.000	
	5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartan egara	Jumlah Paket KomponenInstalas i Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	6	2.758.211.994	Administrasi Umum Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartan egara	Jumlah Paket KomponenInstalas i Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	6	2.958.211.994	
		21						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	200.000.000	untuk pemelihara an kegiatan jaringan listrik pada Sekretariat DPRD

		22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.028	715.965.994	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	715.965.994	mengubah target capaian kinerja
		23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9.504	1.010.422.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	1.010.422.000	mengubah target capaian kinerja
		24	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.180	415.924.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	415.924.000	mengubah target capaian kinerja
		25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	38.352	160.900.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	3	160.900.000	mengubah target capaian kinerja
		26	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	218	318.500.000	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	318.500.000	mengubah target capaian kinerja
		27	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7	136.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7	136.500.000	

		28						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	kab. Kutai Kartanegara	Tersedianya Komponen Instralasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	
	6		Pengadaan Barang Milik Daerah	kab. Kutai Kartan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.389	1.500.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah	kab. Kutai Kartan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.389	2.600.000.000	
			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	egara				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	egara				
								Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	800.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas untuk Pimpinan DPRD Periode 2024-2029
								Pengadaan Mebel	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	300.000.000	Pengadaan Mebeleur staf Sekretariat DPRD
		29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	308	700.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	308	700.000.000	

			atau Bangunan Lainnya		yang disediakan			atau Bangunan Lainnya		yang disediakan			
		30	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.081	800.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250	800.000.000	
	7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	8.453.870.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	8.253.870.000	
		32	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12	3.870.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12	3.870.000	
		33	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Barang Milik Daerah	12	2.500.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Barang Milik Daerah	12	2.300.000.000	menggeser pagu untuk sub kegiatan Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor

		34	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	5.950.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	5.950.000.000	
	8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	254	1.802.553.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	254	2.002.553.000	
		34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	47	311.048.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37	311.048.000	mengubah target capaian kinerja
		35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	47	311.505.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	37	311.505.000	mengubah target capaian kinerja

			Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
		36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10	800.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	11	1.000.000.000	
		37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	150	380.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	150	380.000.000	
	9		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	2	31.802.468.387	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	2	31.802.468.387	
		38	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	540	31.402.018.387	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	540	31.402.018.387	mengubah target capaian kinerja
		39	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	520	320.450.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6	320.450.000	mengubah target capaian kinerja

		40	Pelaksanaan Medical Check up DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45	80.000.000	Pelaksanaan Medical Check up DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45	80.000.000	
	10		Layanan Administrasi DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	3	4.253.170.000	Layanan Administrasi DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	3	4.253.170.000	
		4	Penyelenggara	kab.	Jumlah Dokumen	1	136.500.000	Penyelenggara	kab.	Jumlah Dokumen	1	136.500.000	
		1	an Administrasi Keanggotaan DPRD	Kutai Kartanegara	Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD			an Administrasi Keanggotaan DPRD	Kutai Kartanegara	Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD			
		42	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	349	2.973.570.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	2.973.570.000	mengubah target capaian kinerja
		43	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	4	1.143.100.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	4	1.143.100.000	
II			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	kab. Kutai Kartanegara		100 %	30.676.810.000	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	kab. Kutai Kartanegara		100 %	30.926.810.000	
	11		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang dibuat	16	5.411.700.000	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang dibuat	16	5.511.700.000	

		44	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10	268.750.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	518.750.000	Pagu dari sub kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang - undangan
		45	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	24	3.823.500.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15	3.823.500.000	mengubah target capaian kinerja
		46	Penyelenggara an Kajian Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6	381.650.000	Penyelenggara an Kajian Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6	231.650.000	menggeser pagu untuk sub kegiatan dukungan pelaksanaa
													n sistem pemerintah an berbasis elektronik pada SKPD
		47	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Ket erangan dan/atau Naskah Akademik	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8	937.800.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Ket erangan dan/atau Naskah Akademik	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8	937.800.000	mengubah target capaian kinerja
		48	Penyusunan Tata Tertib DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	0	0	Penyusunan Tata Tertib DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	0	0	

	12		Pembahasan Kebijakan Anggaran	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rapat Pembahasan	18	1.050.000.000	Pembahasan Kebijakan Anggaran	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rapat Pembahasan	18	1.050.000.000	
		49	Pembahasan KUA dan PPAS	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	5	375.000.000	Pembahasan KUA dan PPAS	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	375.000.000	mengubah target capaian kinerja
		50	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	5	375.000.000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	375.000.000	mengubah target capaian kinerja
		51	Pembahasan APBD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2	100.000.000	Pembahasan APBD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	100.000.000	mengubah target capaian kinerja
		52	Pembahasan APBD Perubahan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2	100.000.000	Pembahasan APBD Perubahan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	100.000.000	mengubah target capaian kinerja
		53	Pembahasan Laporan Semester	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2	50.000.000	Pembahasan Laporan Semester	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1	50.000.000	mengubah target capaian kinerja
		54	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2	50.000.000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	50.000.000	mengubah target capaian kinerja

	13		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan DPRD	190	4.158.500.000	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengawasan DPRD	190	3.658.500.000	
		55	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	36	682.500.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3	582.500.000	menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah
		56	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	36	682.500.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3	582.500.000	menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah
		57	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	36	682.500.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3	582.500.000	menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah
		58	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	36	682.500.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3	582.500.000	menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah
		59	Pengawasan Urusan	kab. Kutai	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	36	682.500.000	Pengawasan Urusan	kab. Kutai	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	3	582.500.000	menggeser pagu untuk

			Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kartanegara	Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kartanegara	Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah
		60	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4	200.000.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	200.000.000	Pagu 164.000.000 digeser ke sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		61	Pengawasan Penggunaan Anggaran	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4	364.000.000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	364.000.000	mengubah target capaian kinerja
		62	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2	182.000.000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	182.000.000	mengubah target capaian kinerja
	14		Peningkatan Kapasitas DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	5.391.260.000	Peningkatan Kapasitas DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	300 %	5.541.260.000	

		63	Orientasi DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0	0	Orientasi DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0		
		64	Pendalaman Tugas DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	45	1.274.750.000	Bimbingan Teknis DPRD / Pendalaman Tugas DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3	1.274.750.000	mengubah target capaian kinerja
		65	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	120	1.505.300.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	2	2.124.210.000	mengubah target capaian kinerja
		66	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	7	295.750.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10	1.505.300.000	
		67	Penyelenggara an Hubungan Masyarakat	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	1	182.000.000	Penyelenggara an Hubungan Masyarakat	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	295.750.000	
		68	Penyusunan Program Kerja DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1	159.250.000	Penyusunan Program Kerja DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1	182.000.000	

		69	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	15	1.974.210.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	159.250.000	adanya JDIHN yang harus dilengkapi dengan informasi tambahan melalui aplikasi JDIH Daerah
	15		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	kab. Kutai Kartanegara	Persentase Kegiatan yang terlaksana	100 %	3.683.660.000	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	kab. Kutai Kartanegara	Persentase Kegiatan yang terlaksana	100 %	4.083.660.000	
		70						Kunjungan Kerja Dalam Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3	500.000.000	kundapil dan koordinasi (undangan)
		7	Penyusunan	kab.	Jumlah Dokumen	2	129.485.000	Penyusunan	kab.	Jumlah Dokumen	2	129.485.000	
		1	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kutai Kartanegara	Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun			Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kutai Kartanegara	Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun			
		72	Pelaksanaan Reses	kab. Kutai Kartanegara	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	3.554.175.000	Pelaksanaan Reses	kab. Kutai Kartanegara	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	3.454.175.000	menggeser pagu untuk sub kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujua n

													Kerja Sama Daerah
	16		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan	100 %	333.790.000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan	100 %	333.790.000	
		73	Penyusunan Kode Etik DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	136.500.000	Penyusunan Kode Etik DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	136.500.000	
		74	Pengawasan Kode Etik DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	10	197.290.000	Pengawasan Kode Etik DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3	197.290.000	mengubah target capaian kinerja
	17							Pembahasan Kerja Sana Daerah	kab. Kutai Kartanegara		100 %	100.000.000	
		75						Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1	100.000.000	untuk mendukun g kerja sama DPRD dengan instansi vertikal

	1		Fasilitasi	kab.	Prosentase	100	10.647.900.	Fasilitasi	kab.	Prosentase	100	10.647.900.	
	8		Tugas DPRD	Kutai Kartanegara	Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	%	000	Tugas DPRD	Kutai Kartanegara	Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	%	000	
		76	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	96	7.694.800.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3	100.000.000	menggeser pagu untuk sub kegiatan penyusuna n laporan kinerja DPRD
		77						Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3	7.594.800.000	untuk menghimpun dokumen laporan hasil kinerja AKD selama 3 (tiga) masa sidang
		78	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	14	182.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3	182.000.000	mengubah target capaian kinerja
		79	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	96	2.771.100.000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3	2.771.100.000	mengubah target capaian kinerja
			TOTAL				105.427.869.139	TOTAL				166.960.757.766	

2.4 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan hasil dari musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) tingkat Kecamatan Tenggarong untuk Tahun 2025.

Berdasarkan uraian diatas, tidak ada usulan Program dan Kepentingan dari Para Pemangku kepentingan yang dituju kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

Table T C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

No	Kamus Usulan	Permasalahan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
							Sekretariat DPRD tidak ada usulan Musrembang

BAB. III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan yang jelas dan sinergis harus selaras dengan Visi dan Misi serta memperhatikan potensi dan stabilitas daerah.

Rencana Strategis yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen perencanaan tersebut disusun dan dirumuskan setiap lima tahun, memuat strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan dan diimplementasikan melalui Program dan kegiatan- kegiatan.

Visi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) pada tahun 2020-2025 adalah :

"Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri tersebut, maka visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ada beberapa kesesuaian dan merupakan penjabaran dari visi dan misi tersebut. Adapun misi yang ditetapkanuntuk mewujudkan visi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2025. Reformasi 1998 menjanjikan lahirnya Indonesia baru yang lebih demokratis, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. Jalan perubahan menuju Indonesia Hebat adalah jalan ideologis. Untuk itu, dalam lima tahun ke depan, pemerintahan kami akan dipandu oleh VISI sebagai berikut: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

Upaya untuk mewujudkan Visi terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong itu akan ditempuh melalui MISIsebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi - Misi Nasional Pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

'Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia'

Sejahtera adalah Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak – hak dasar seperti Pendidikan, kesehatan, pangan dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan

Berbahagia adalah kondisi masyarakat Kukar yang harmonis, hidup dengan penuh ketentraman, diselumuti rasa kebersamaan, kepedulian dan gotong royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maya Esa.

Misi ;

1. Memanfaatkan birokrasi yang bersih, efektif, efesien dan melayani.
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya
3. Memperkuat pembangunan ekonomi berbagsis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif
4. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah
5. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya ALam yang

Berwawasan Lingkungan.

6. Dengan mengacu kapada visi – Misi RPJMD 2021 – 2026, Misi yang melekat pada Sekretariat DPRD yaitu Memanfaatkan birokrasi yang bersih, efektif, efesien dan melayani.

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Tujuan dan sasaran adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian misi dan visi organisasai. Tujuan (goals) adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian misi dan visi organisasai. Tujuan (goals) adalah pernyataan umum tentang “ke arah mana” suatu organisasi akan berada di masa depan, merupakan penjabaran Misi, Sesuatu (what) yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, dan program dalam rangaka merealisasikan misi. Tujuan dibatasi jumlahnya agar lebih terfokus; meskipun demikian tujuan belum bersifat spesifik dan tidak terukur.

Sasaran (Objectives) bersifat lebih rinci dan memperlihatkan langkah atau gerakan menuju pencapaian tujuan (penjabaran dari tujuan secara terukur). Sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan,atau bulanan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terkunci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran merupakan target yang bersifat spesifik dan terukur dari tiap tujuan biasanya disusun beberapa sasaran. Karena yang dapat diukur adalah sasaran (bukan tujuan), maka bila semua sasaran telah tercapai maka tujuan dianggap tercapai pula. Sehingga dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya acan sebagai tolak ukur untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan sehingga Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunya strategis;

Tujuan : Mewujudkan kualitas fasilitsi terhadaf Agenda Kegiatan DPRD

Sasaran : Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPRD

BAB. IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam renstra tahun 2016 – 2021. Pada dasarnya rencana kerja tahun 2025 menguraikan target kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program dan kegiatan baik yang telah ditentukan dalam renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

   Dalam tahun anggaran 2025 dalam perumusan program dan kegiatan, terdapat beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan selain adanya program kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya serta ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum tercapai tingkat kinerjanya, disamping program dan kegiatan tersebut telah sesuai dengan Renstra.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi, maka diperlukan penyesuaian kegiatan pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Rencana Kerja tahunan tahun 2025 dan target kegiatan tahun 2025 mengalami perubahan baik dari jumlah program maupun jenis kegiatannya. Adapun jumlah kegiatan pada tahun 2025 terdiri dari :

1. Untuk kegiatan generik terdiri dari 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan 10 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan.
2. Untuk kegiatan non generik terdiri dari 1 program yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD, dengan 8 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan.
3. Sehingga seluruhnya berjumlah 2 program, 18 Kegiatan dan 81 Sub Kegiatan

c. rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

Dari rencana program dan kegiatan tersebut diatas, tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan dengan Rancangan Renja, untuk menyikapi hal tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian terhadap kegiatan generik, baik dalam penyesuaian target kinerja hingga penundaan kegiatan.
2. Melakukan penentuan kegiatan prioritas dengan memberikan peringkat terhadap kegiatan yang dianggap sangat prioritas.
3. Menyesuaikan Dengan Berita Acara Kesepakatan Review Program RPJMD

Adapun kegiatan yang dianggap sangat prioritas dapat diurut sebagai berikut:

a. Prosentase Penyelenggara Rapat-Rapat yang Sesuai dengan Jadwal
b. Jumlah Peraturan Perundangan-udangan yang disahkan
c. Persentase Anggota DPRD yang puas atas layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Adapun perincian Kegiatan Tahun 2025 dihubungkan dengan sumber dana dan ekspektasi pembiayaan untuk menjalankan program dan kegiatan serta prakiraan maju rencana maju tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capai an Kinerj a	Kebutukan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Target Capai an Kinerj a	Kebutukan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2	1	2			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		kab. Kutai Kartaneg ara	79 (BB)	136.033.947.76 6	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		79 (BB)	136.033.947.76 6
4	2	1	2	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartaneg ara	12	750.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12	750.000.000
4	2	1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanega ra	3	450.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3	450.000.000

4	2	1	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	4	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		4	300.000.000
4	2	1	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	0
4	2	1	2	1	4	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen DPA-	kab. Kutai	0	0	Dana Transfer		0	0
						Penyusunan DPA-SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kartanegara			Umum - Dana Bagi Hasil			
4	2	1	2	1	4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	kab. Kutai Kartanegara	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	0
4	2	1	2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	kab. Kutai Kartanegara	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	0

							Kinerja SKPD							
4	2	1	2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	0
4	2	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	kab. Kutai Kartanegara	6	82.122.609.385	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6	82.122.609.385
4	2	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	kab. Kutai Kartanegara	2.310	81.213.981.385	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penambahan ASN sebanyak 7 orang	2.310	81.213.981.385
4	2	1	2	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	kab. Kutai Kartanegara	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	0

4	2	1	2	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	kab. Kutai Kartanegara	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	0
4	2	1	2	2	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	kab. Kutai Kartanegara	1	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	25.000.000
4	2	1	2	2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	kab. Kutai Kartanegara	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	0
4	2	1	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	kab. Kutai Kartanegara	18	858.628.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		18	858.628.000
4	2	1	2	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	kab. Kutai Kartanegara	1	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		1	25.000.000

											Hasil			
4	2	1	2	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	kab. Kutai Kartanegara	1	105.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	105.000.000
4	2	1	2	3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	kab. Kutai Kartanegara	1	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi pada Sekretariat DPRD di pasal 12 ayat e dan f, tata kerja kelompok jabatan fungsional perencana yang mana menjadi tupoksi dari Perencana	1	25.000.000

4	2	1	2	3	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		1	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	50.000.000
4	2	1	2	3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	kab. Kutai Kartanegara	1	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	30.000.000
4	2	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	kab. Kutai Kartanegara	4	1.186.065.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		4	1.186.065.000
4	2	1	2	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	kab. Kutai Kartanegara	6	400.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	6	400.000.000
4	2	1	2	5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartanegara	3	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1. Absensi 2. DUK 3. KENPA 4. KGB 5. Satya Lencana 7.LHKASN 8.	3	100.000.000

												LHKASN		
4	2	1	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartanegara	168	336.065.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		168	336.065.000
4	2	1	2	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	kab. Kutai Kartanegara	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu anggaran untuk sub kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	0	0
4	2	1	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	20	350.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		20	350.000.000
4	2	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	6	2.958.211.994	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		6	2.958.211.994

											Hasil			
4	2	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	1	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	untuk pemeliharaan kegiatan jaringan listrik pada Sekretariat DPRD	1	200.000.000
4	2	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	1	715.965.994	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	715.965.994
4	2	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	2	1.010.422.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	1.010.422.000
4	2	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	kab. Kutai Kartanegara	2	415.924.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	415.924.000
4	2	1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	kab. Kutai Kartanegara	3	160.900.000	Dana Transfer Umum - Dana		3	160.900.000

											Bagi Hasil			
4	2	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kab. Kutai Kartanegara	12	318.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi		12	318.500.000
											Hasil			
4	2	1	2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Komponen Instralasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor	kab. Kutai Kartanegara	7	136.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		7	136.500.000
4	2	1	2	6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	0
4	2	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	1.389	2.600.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1.389	2.600.000.000
4	2	1	2	7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	kab. Kutai Kartanegara	8	800.000.000			8	800.000.000

						Dinas Jabatan	Bangunan Lainnya yang Disediakan							
4	2	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	kab. Kutai Kartanegara	1	300.000.000			1	300.000.000
4	2	1	2	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kab. Kutai Kartanegara	308	700.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		308	700.000.000
4	2	1	2	7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	250	800.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		250	800.000.000
4	2	1	2	8		Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	kab.	12	8.253.870.000	Dana		12	8.253.870.000
						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan	Kutai Kartanegara			Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			
4	2	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Barang Milik Daerah	kab. Kutai Kartanegara	12	3.870.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12	3.870.000

4	2	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	kab. Kutai Kartanegara	12	2.300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	2.300.000.000
4	2	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	kab. Kutai Kartanegara	12	5.950.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12	5.950.000.000
4	2	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	kab. Kutai Kartanegara	254	2.002.553.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		254	2.002.553.000
4	2	1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	kab. Kutai Kartanegara	37	311.048.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		37	311.048.000
4	2	1	2	9	2	Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan Dinas	kab. Kutai	37	311.505.000	Dana		37	311.505.000

						Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kartanegara			Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			
4	2	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	kab. Kutai Kartanegara	11	1.000.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		11	1.000.000.000
4	2	1	2	9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	kab. Kutai Kartanegara	150	380.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		150	380.000.000
4	2	1	2	15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	2	31.802.468.387	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	31.802.468.387
4	2	1	2	15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	kab. Kutai Kartanegara	540	31.402.018.387	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		540	31.402.018.387

4	2	1	2	15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	kab. Kutai Kartanegara	6	320.450.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6	320.450.000
4	2	1	2	15	3	Pelaksanaan Medical Check up DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	kab. Kutai Kartanegara	45	80.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		45	80.000.000
4	2	1	2	16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	3	4.253.170.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3	4.253.170.000
4	2	1	2	16	1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	kab. Kutai Kartanegara	1	136.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	136.500.000
4	2	1	2	16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	kab. Kutai Kartanegara	12	2.973.570.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12	2.973.570.000

4	2	1	2	16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		kab. Kutai Kartanegara	4	1.143.100.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		4	1.143.100.000
4	2	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang dibuat	kab. Kutai Kartanegara	100%	30.926.810.000	Dana Transfe r Umum - Dana Bagi Hasil		100%	30.926.810.000
4	2	2	2	1		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		kab. Kutai Kartanegara	16	5.511.700.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		16	5.511.700.000
4	2	2	2	1	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	kab. Kutai Kartanegara	1	518.750.000	Dana Transfer Umum - Dana	Pagu dari sub kegiatan Sosialisasi Peraturan	1	518.750.000
						Peraturan Daerah					Bagi Hasil	perundang - undangan		
4	2	2	2	1	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	kab. Kutai Kartanegara	15	3.823.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		15	3.823.500.000

4	2	2	2	1	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	kab. Kutai Kartanegara	6	231.650.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	6	231.650.000
4	2	2	2	1	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterang an dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	kab. Kutai Kartanegara	8	937.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		8	937.800.000
4	2	2	2	1	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Rapat Pembahasan	kab. Kutai Kartanegara	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	0
4	2	2	2	2		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	kab. Kutai Kartanegara	18	1.050.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		18	1.050.000.000
4	2	2	2	2	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	kab. Kutai Kartanegara	1	375.000.000	Dana Transfer Umum -	mengubah target capaian kinerja	1	375.000.000

											Dana Bagi			
											Hasil			
4	2	2	2	2	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	kab. Kutai Kartanegara	1	375.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	1	375.000.000
4	2	2	2	2	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	kab. Kutai Kartanegara	1	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	1	100.000.000
4	2	2	2	2	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	kab. Kutai Kartanegara	1	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	1	100.000.000
4	2	2	2	2	5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	kab. Kutai Kartanegara	1	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	1	50.000.000

4	2	2	2	2	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Pengawasan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	1	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	mengubah target capaian kinerja	1	50.000.000
4	2	2	2	3		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	kab. Kutai Kartanegara	190	3.658.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		190	3.658.500.000
4	2	2	2	3	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	kab. Kutai Kartanegara	3	582.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan	3	582.500.000
											Hasil	kerja dalam daerah		
4	2	2	2	3	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	kab. Kutai Kartanegara	3	582.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah	3	582.500.000
4	2	2	2	3	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	kab. Kutai Kartanegara	3	582.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah	3	582.500.000

4	2	2	2	3	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	kab. Kutai Kartanegara	3	582.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah	3	582.500.000
4	2	2	2	3	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	kab. Kutai Kartanegara	3	582.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah	3	582.500.000
4	2	2	2	3	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	kab. Kutai Kartanegara	1	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pagu 164.000.000 digeser ke sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	200.000.000
4	2	2	2	3	7	Pengawasan Penggunaan	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan	kab. Kutai Kartanega	1	364.000.000	Dana Transfer Umum -		1	364.000.000
						Anggaran	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	ra			Dana Bagi Hasil			
4	2	2	2	3	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	kab. Kutai Kartanegara	1	182.000.000	Dana Transfer Umum - Dana		1	182.000.000

											Bagi Hasil			
4	2	2	2	4		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	kab. Kutai Kartanegara	100%	5.541.260.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	5.541.260.000
4	2	2	2	4	1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	kab. Kutai Kartanegara	0		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	
4	2	2	2	4	2	Bimbingan Teknis DPRD / Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	kab. Kutai Kartanegara	3	1.274.750.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3	1.274.750.000
4	2	2	2	4	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	kab. Kutai Kartanegara	2	2.124.210.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	adanya JDIHN yang harus dilengkapi dengan informasi tambahan melalui aplikasi JDIH Daerah	2	2.124.210.000

4	2	2	2	4	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	kab. Kutai Kartanegara	10	1.505.300.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		10	1.505.300.000
4	2	2	2	4	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	kab. Kutai Kartanegara	7	295.750.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		7	295.750.000
4	2	2	2	4	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	kab. Kutai Kartanegara	1	182.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	182.000.000
4	2	2	2	4	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase Kegiatan yang terlaksana	kab. Kutai Kartanegara	1	159.250.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	159.250.000
4	2	2	2	5		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	kab. Kutai Kartanegara	100%	4.083.660.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	4.083.660.000

4	2	2	2	5	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	kab. Kutai Kartanegara	3%	500.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	untuk kundapil dan koordinasi (undangan)	3%	500.000.000
4	2	2	2	5	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	kab. Kutai Kartanegara	2	129.485.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	129.485.000
4	2	2	2	5	3	Pelaksanaan Reses	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan	kab. Kutai Kartanegara	3	3.454.175.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi	menggeser pagu untuk sub kegiatan Fasilitasi,	3	3.454.175.000
											Hasil	Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah		
4	2	2	2	6		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	kab. Kutai Kartanegara	100%	333.790.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	333.790.000

4	2	2	2	6	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	kab. Kutai Kartanegara	1	136.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	136.500.000
4	2	2	2	6	2	Pengawasan Kode Etik DPRD		kab. Kutai Kartanegara	3	197.290.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3	197.290.000
4	2	2	2	7		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	kab. Kutai Kartanegara	100%	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	100.000.000
4	2	2	2	7	1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Prosentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	kab. Kutai Kartanegara	1	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	untuk mendukung kerja sama DPRD dengan instansi vertikal	1	100.000.000
4	2	2	2	8		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	kab. Kutai Kartanegara	100%	10.647.900.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100%	10.647.900.000

4	2	2	2	8	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	kab. Kutai Kartanegara	3	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	menggeser pagu untuk sub kegiatan penyusunan laporan kinerja DPRD	3	100.000.000
4	2	2	2	8	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	3	7.594.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	untuk menghimpun dokumen laporan hasil kinerja AKD selama 3 (tiga) masa sidang	3	7.594.800.000
4	2	2	2	8	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	3	182.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3	182.000.000
4	2	2	2	8	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	kab. Kutai Kartanegara	3	2.771.100.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3	2.771.100.000
						TOTAL				166.960.757.766				166.960.757.766

BAB. V
P E N U T U P

5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seaindainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan teknis tahunan bagi SKPD yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Sedangkan apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan dalam pelaksanaan RENJA yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan. RENJA berorientasi pada norma aturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas serta memiliki visi kedepan yang hasil akhirnnya dapat diukur dengan jelas dan pasti. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas, baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Sehubungan dengan hal tersebut, berikut kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 :

1. Sekretariat DPRD kabupaten Kutai Kartanegara agar melaksanakan program – program dalam RENJA ini dengan sebaik – baiknya secara konsisten, tertib dan terpadu melalui Kerjasama dan koordinasi antar bagian maupun pihak – pihak terkait
2. Berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan pasal 273 ayat (2) dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Renstra berpedoman pada RPJMD untuk dirumuskan dalam Rancangan Renja sebagai bahan penyusunan RKPD
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap Renstra dan RENJA PD
4. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas

ii.RENJA INSPEKTORAT

BAB I

PENDAHULUAN

Dinamika perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang terjadi begitu cepat menuntut perlunya sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif, dan mengarah pada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya pembangunan yang jumlahnya terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan.

Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari tugas pokok tersebut maka disusunlah sasaran kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah yaitu meningkatnya kinerja pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sasaran kinerja tersebut memiliki beberapa indikator pengukuran kinerja yang paling utama yaitu persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP, persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Saat ini kinerja Pemerintah Daerah semakin mendapat sorotan dari masyarakat, sehingga pemerintah dituntut mampu untuk menunjukan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat sebagai salah satu *stakeholder*. Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, sebuah perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Good Governance* merupakan salah satu prinsip dasar yang digunakan dalam menyusun Renja Inspektorat Daerah, sehingga diharapkan ke depannya pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dipantau dan dievaluasi dengan sangat baik dan terukur.

Selain itu ke depannya dapat dilakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan ataupun perkembangan baru di lingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

1.1 LATAR BELAKANG

Renja Tahun 2025 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini merupakan proses penetapan indikator kinerja tahunan perangkat daerah berdasarkan kebijakan, tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan

yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah periode 2021-2026, yang disesuaikan dengan RKPD Tahun Anggatran 2025.

Proses perencanaan kinerja tahunan ini merupakan suatu dasar dalam menganalisis permasalahan dan akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan di masa yang akan datang, serta untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan. Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Renja ini akan dicantumkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terperinci sebagai bentuk terjemahan dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengelolaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang dibutuhkan secara optimal.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar landasan hukum penyusunan dokumen Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6485) dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Renja Inspektorat Daerah ini memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selainitu termuat pula keteranganmengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan

sasaran, kebijakan dengan program-programnya. Dalam Renja ini juga terdapat informasi-informasi yang akan memudahkan perangkat daerah dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja.

Sehingga pada akhirnya dapat dilakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa maksud disusunnya Renja ini antara lain adalah:

a. Sebagai penjabaran dari Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026.
b. Mengoptimalkan tugas dan fungsi serta peranan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku perangkat daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menjabarkan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan yang terperinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama periode Renstra.
b. Sebagai salah satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menentukan program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan sumber dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.
c. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antar Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui pelaksanaan tugas-tugas Pembinaan dan Pengawasan.
d. Sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mewujudkan Good Governance.
e. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam Dokumen Renja Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan Renja Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara serta sistematika penyusunan Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Dalam Bab ini memuat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

BAB III TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat Telaahan terhadap Kebijakan nasional dan Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program dan Kegiatan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan Catatan yang penting yang perlu mendapat perhatian, Kaidah pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini akan membahas tentang evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah yang akan membahas tentang capaian tahun sebelumnya dan capaian yang tercantum dalam dokumen Renstra. Kemudian akan dilakukan analisis terhadap kinerja pelayanan beserta dengan isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah. Selanjutnya akan membahas tentang hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang dilakukan oleh tim perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, beserta dengan hasil telaah terhadap usulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang melibatkan masyarakat selaku salah satu *stakeholder*.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Renja perangkat daerah adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra perangkat daerah tersebut yang kemudian akan diukur pencapaian kinerjanya dalam Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan penyusunan program/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang sahih dalam mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal yaitu pencapaian kinerja output dan pencapaian kinerja keuangannya. Yang dimaksud dengan kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah

ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

Evaluasi kinerja dimulai dengan perhitungan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan

lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan.

Untuk pencapaian dari masing-masing Program kegiatan tahun 2023 telah dijabarkan pada penjelasan dibawah ini. Program kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

   Pagu Anggaran yang disediakan untuk program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah APBD Perubahan adalah sebesar Rp34.516.174.628,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp27.588.702.390,- atau tercapai 79,93 %. Sedangkan untuk capaian kinerja dari program ini yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dari target nilai 82 hasil evaluasi implementasi SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 yang dilakukan penilaian pada tahun 2023 memperoleh nilai 84,90 dengan kategori A dan dapat diinterprestasikan memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. Pencapaian ini dapat dilakukan dengan dilaksanakan kegiatan dalam program ini sesuai rencana dengan kerjasama semua pihak yang terkait demi pencapaian kinerja. Selain yang mencakup Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat kemudian tercapainya target Penilaian Kapabilitas APIP ke Level 3 dari Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri oleh BPKP yakni APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

   Pagu Perubahan yang disediakan pada program ini sebesar Rp10.750.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp5.716.816.403,- atau mencapai 53,18%. Untuk indikator kinerja Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan Program Penyelenggaraan Pengawasan yang ditargetkan 96% dengan

realisasi 168%.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

   Pagu Anggaran Perubahan yang disediakan untuk program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp3.750.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp2.306.264.672,- atau mencapai 61,50%.

   Sedangkan untuk Kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan target 65% Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP tercapai seratus persen dari target yang berarti telah tercapai target sesuai yang direncanakan.

   Kegiatan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dilaksanakan sesuai rencana dengan kerjasama semua yang terkait dan

   juga adanya Komitmen Perangkat Daerah diantaranya dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perudang-undangan. Dimana Pencapaian Evaluasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara oleh BPKP telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Level 3 (Terdefinisi), juga dalam Penilaian MCP (Monitoring Center for Prevention), Pencapaian Target LHKASN, serta Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

   Secara keseluruhan untuk Program pada tahun 2023 memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan, hanya saja untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada sub kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal sudah dilaksanakan pada tahap persiapan, dalam perjalanannya untuk kerjasama pengawasan internal belum ada terbentuk kesepakatan.

Berikut disajikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel TC - 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra-Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama OPD : Inspektorat Daerah

Lembar : .....

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja-PD Tahun (2023)	Realisasi Renja-PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan									
6.01	Inspektorat Daerah									
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	90 Nilai	84,9 Nilai	82 Nilai	84,90 Nilai	103,5	85 Nilai	82 Nilai	91
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3 Level	3 Level	3 Level	3 Level	100	3 Level	3 Level	100

6.01.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja*	*30 Dokumen*	*12 Dokumen*	*6 Dokumen*	*6 Dokumen*	*100*	*8 Dokumen*	*26 Dokumen*	*86,67*

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja-PD Tahun (2023)	Realisasi Renja-PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	5 Dokumen	12 Dokumen	60
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	3 Dokumen	6 Dokumen	60
6.01.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel*	*3 Laporan*	*3 Laporan*	*3 Laporan*	*3 Laporan*	*100*	*3 Laporan*	*3 Laporan*	*100*
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5880 Orang / bulan	2280 Orang / bulan	1260 Orang / bulan	1209 Orang / bulan	95,95	1260 Orang / bulan	3489 Orang / bulan	59,34
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100

6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja-PD Tahun (2023)	Realisasi Renja-PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
6.01.01.2.03	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*100*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*100*
6.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
6.01.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*3 Dokumen*	*3 Dokumen*	*3 Dokumen*	*3 Dokumen*	*100*	*4 Dokumen*	*4 Dokumen*	*133*
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	1 Paket	1 Paket	100	2 Paket	1 Paket	50
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	30 Orang	150 Orang	181 Orang	120,67	100 Orang	211 Orang	141

6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	175 Orang	35 Orang	100 Orang	155 Orang	155	70 Orang	190 Orang	108,57

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja-PD Tahun (2023)	Realisasi Renja-PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	175 Orang	35 Orang	135 Orang	224 Orang	165,93	110 Orang	369 Orang	210,86
6.01.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*6 Layanan*	*6 Layanan*	*6 Layanan*	*6 Layanan*	*100*	*6 Layanan*	*6 Layanan*	*100*
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	6 Paket	150
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	19 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	21 Paket	111
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8 Paket	2 Paket	2 Paket	3 Paket	150	3 Paket	8 Paket	100
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	60

6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	100	90 Laporan	190 Laporan	76

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja-PD Tahun (2023)	Realisasi Renja-PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.250 Dokumen	250 Dokumen	250 Dokumen	250 Dokumen	100	350 Dokumen	850 Dokumen	68
6.01.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*414 Unit*	*30 Unit*	*171 Unit*	*168 Unit*	*98,25*	*171 Unit*	*369 Unit*	*89,13*
6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	-	5 Unit	5 Unit	100	-	5 Unit	100
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	-	8 Unit	7 Unit	87,50	-	7 Unit	88
6.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100

6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	400 Unit	30 Unit	157 Unit	155 Unit	98,73	170 Unit	355 Unit	89
6.01.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	*100*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	*100*

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja-PD Tahun (2023)	Realisasi Renja-PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
6.01.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara*	*18 Unit*	*15 Unit*	*18 Unit*	*18 Unit*	*100*	*15 Unit*	*15 Unit*	*83,33*
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	6 Unit	7 Unit	7 Unit	100	6 Unit	6 Unit	86

	Dinas Jabatan									

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja-PD Tahun (2023)	Realisasi Renja-PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	6 Unit	8 Unit	8 Unit	100	6 Unit	6 Unit	75
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	2 Unit	100
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	97 Persen	93 Persen	96 Persen	168 Persen	175	96 Persen	96 Persen	99
6.01.02.2.01	*Penyelenggaraan Pengawasan Internal*	*Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pengawasan*	*70 Dokumen*	*207 Dokumen*	*71 Dokumen*	*71 Dokumen*	*100*	*97 Dokumen*	*67 Dokumen*	*96*

6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100	5 Laporan	5 Laporan	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja-PD Tahun (2023)	Realisasi Renja-PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	28 Laporan	3 Laporan	100
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100	16 Laporan	16 Laporan	100
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	59 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	38 Laporan	38 Laporan	38 Laporan	41 Laporan	107,89	40 Laporan	38 Laporan	100
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	9 Kesepakatan	- Kesepakatan	3 Kesepakatan	- Kesepakatan	-	3 Kesepakatan	- Kesepakatan	-
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100

6.01.02.2.02	*Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*	*Jumlah dokumen Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*	*19 Dokumen*	*18 Dokumen*	*19 Dokumen*	*45 Dokumen*	*237*	*19 Dokumen*	*19 Dokumen*	*100*

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja-PD Tahun (2023)	Realisasi Renja-PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan	14 Laporan	15 Laporan	41 Laporan	273,33	15 Laporan	15 Laporan	100
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP	100 Persen	55 Persen	65 Persen	65 Persen	100	75 Persen	75 Persen	75
6.01.03.2.01	*Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan*	*Jumlah dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan*	*4 Dokumen*	*4 Dokumen*	*4 Dokumen*	*4 Dokumen*	*100*	*4 Dokumen*	*4 Dokumen*	*100*
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5 Rekomen dasi	1 Rekomend asi	1 Rekomen dasi	1 Rekomend asi	100	1 Rekomend asi	3 Rekomend asi	60

6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	15 Rekomen dasi	3 Rekomendasi	3 Rekomen dasi	3 Rekomendasi	100	3 Rekomendasi	9 Rekomendasi	60

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja-PD Tahun (2023)	Realisasi Renja-PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
6.01.03.2.02	*Pendampingan dan Asistensi*	*Jumlah dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi*	*83 Dokumen*	*77 Dokumen*	*83 Dokumen*	*83 Dokumen*	*100*	*83 Dokumen*	*83 Dokumen*	*100*
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	56 Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah	56 Perangkat Daerah	56 Perangkat Daerah	100	56 Perangkat Daerah	56 Perangkat Daerah	100
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	13 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	100	13 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	100
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	9 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100

6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	100	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	100

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada awal Penyusunan RENJA tahun 2023 telah menargetkan 80 % untuk persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, sedangkan realisasinya adalah sebesar 89,22%, artinya capaian kinerja sudah melampaui dari target yang ditetapkan.

Untuk persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP juga mengalami peningkatan karena realisasinya melampaui yang ditarget 71 % tingkat penyelesaiannya menjadi 76,94 %.Persentase Jumlah Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, target tidak terpenuhi dari yang ditargetkan 92 % tercapai 82%, Hal ini terjadi karena adanya Laporan yang berbatas waktu penanganan (Pengaduan Lelang), sedangkan tenaga pengawas yang kompeten menangani sedang dalam tahap penugasan yang bersamaan, dan adanya laporan yang masuk di penghujung tahun.

Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah mencapai target yang telah ditetapkan, yakni dari 3 Nilai yang ditargetkan dengan capaian 3 Nilai.

Tabel TC - 30

Pencapaian Kinerja Layanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator *)	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA – PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2		3	5	6	7	7	9	10	11	12	13
1	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI			80	82	84	86	89,22	-	84	86	Target Terpenuhi
2	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP			71	74	77	79	76,94	-	77	79	Target Terpenuhi
3	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti			92	94	96	98	82	-	96	98	Target Tidak terpenuhi
4	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			3	3	3	4	3	-	3	4	Target Terpenuhi

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat sebagai unsur Pengawasan dan Pembinaan bagi Perangkat Daerah lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara maka isu-isu strategis yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara 5 tahun kedepan antara lain:

1. Implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh antara lain:
   a) Membantu Bupati dalam Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah;
   b) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Peningkatan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia adalah dengan melaksanakan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pengawas Intern Pemerintah sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan;
3. Adanya Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) peran Inspektorat adalah mengawal pelaksanaan kegiatan yang terkait persiapan pembangunan ibu Kota Negara (IKN) di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Masih kurangnya respon Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan baik hasil pemeriksaan internal maupun eksternal;
5. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan perangkat daerah;
6. Identifikasi resiko dan penilaian resiko belum maksimal dilaksanakan terutama terhadap program dan kegiatan di perangkat daerah;

7. Belum optimalnya manajemen perangkat daerah dalam menerapkan SAKIP sebagai landasan terwujudnya Good Governance; dan
8. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh perangkat daerah.

Terkait dengan kinerja penyelenggaraan publik, Inspektorat juga memiliki tugas pembinaan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kabupaten Kutai Kartanegara. Pembinaan ini menjadi salah satu hal yang

sangat mengemuka terutama dengan semakin sadarnya publik akan kualitas pelayanan yang mereka terima dari penyelenggara pelayanan publik.

Selain isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Inspektorat, yaitu :

1. Faktor Internal

a. Terbatasnya aparatur pengawas dibandingkan cakupan luasan wilayah dan obyek pengawasan, dimana Dengan Luasan wilayah Pengawasan dan jumlah Auditan yang terdiri dari 39 Perangkat Daerah, 20 Kecamatan, 193 Desa, dan 32 Puskesmas serta 3 Rumah sakit sebagai pelaksana BLUD, juga lebih dari 500 Sekolah sebagai penerima Dana BOS yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu permasalahan tersendiri bagi kegiatan Pengawasan / pembinaan yang dilaksanakan Inspektorat dalam rangka mengemban amanat pengawasan yang dituangkan dalam Kebijakan Pengawasan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri pada point Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah.
b. Selain itu adanya permasalahan yang semakin komplek dan beragam serta perubahan peraturan yang berlaku, mewajibkan Inspektorat harus mempersiapkan Sumber Daya Aparatur pengawas yang profesional dan handal dalam melaksanakan kegiatan pengawasan/pembinaan baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga memerlukan anggaran yang cukup

untuk mengikuti Diklat Penjenjangan maupun Diklat teknis yang terkait dengan Pengawasan.

2. Faktor Eksternal

a. Belum maksimalnya penerapan SPIP di OPD dimana adanya temuan- temuan berulang hasil pemeriksaan merupakan indikator bahwa SPIP belum diterapkan / diselenggarakan secara efektif. Hal ini merupakan amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif di setiap pelaksanaan tupoksi OPD.

b. Masih tidak optimalnya respon Perangkat Daerah terhadap penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, maupun Hasil Pemeriksaan APIP.

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.
2. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.
3. Mewujudkan Inspektorat sebagai Counsultant Partner.
4. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Adapun perbandingan antara Rancangan Awal RKPD 2025 dengan Hasil analisis Kebutuhan 2025 Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Untuk kegiatan yang telah mengalami penambahan dan pengurangan pagu anggaran maupun penyesuaian target capaian kinerja Sub Kegiatan antara lain adalah :

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada rancangan awal RKPD 2025 telah menargetkan kinerja 4 dokumen dengan Pagu Rp100.000.000 menjadi 5 dokumen untuk target kinerjanya dengan pagu anggaran Rp450.000.000. Sub Kegiatan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah yang semula menargetkan 2 laporan dengan pagu Rp100.000.000 menjadi 3 laporan terkait target kinerjanya dengan pagu Rp150.000.000. Jadi untuk kedua sub kegiatan tersebut mengalami penyesuaian target kinerja dan penambahan pagu sub kegiatan. Pada kegiatan ini juga telah mengalami penambahan sub kegiatan baru. Adapun sub kegiatan tersebut adalah :

1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, untuk target kinerja 1 laporan dengan pagu anggaran Rp50.000.000.
2) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, untuk target kinerja 1 dokumen dengan pagu anggaran Rp50.000.000.
3) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, untuk target kinerja 1 berita acara dengan pagu anggaran Rp50.000.000.

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN telah menyesuaikan gaji tahun sebelumnya sebesar Rp.15.608.271.494 dengan target kinerja 1176 orang/bulan. Untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD telah dilakukan pengurangan pagu anggaran sub kegiatan. Pada kegiatan ini juga telah mengalami penambahan sub kegiatan baru yaitu sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan target kinerja 1 dokumen, untuk pagu anggaran Rp.25.000.000.

c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah telah mengalami penambahan sub kegiatan baru yaitu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD telah menargetkan 1 dokumen dengan pagu anggaran Rp25.000.000 dan sub kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD juga telah menargetkan 1 laporan dengan pagu anggaran Rp50.000.000.

d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu sebesar Rp420.000.000 menyesuaikan keperluan pembayaran listrik, air dan internet kantor. Dan pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran Rp2.098.969.164, penyesuaian terhadap Keperluan Inspektorat untuk pemenuhan Jasa Tenaga Ahli dan Tenaga Outsourcing.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal telah mengalami penambahan dan pengurangan pagu serta penyesuaian target kinerja sub kegiatan antara lain :

a) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran awal Rp1.250.000.000 serta target kinerja 3 laporan menjadi pagu anggaran Rp.1.500.000.000 serta target kinerja 10 laporan.

b) Reviu Laporan Keuangan mengalami pengurangan pagu anggaran sub kegiatan yang semula sebesar Rp1.500.000.000 menjadi Rp1.250.000.000,-

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

Pada Kegiatan Pendampingan dan Asistensi ada beberapa sub kegiatan telah mengalami penyesuaian target kinerja dan penambahan pagu sub kegiatan antara lain :

1) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan penambahan pagu anggaran yang semula Rp1.200.000.000 serta penyesuaian target kinerja 56 perangkat daerah menjadi Rp1.500.000.000 untuk pagu anggaran dengan target kinerja 58 Perangkat Daerah.

2) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan penyesuaian pagu Rp400.000.000,-

3) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan penyesuaian pagu Rp1.000.000.000,-

4) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan penyesuaian pagu anggaran sebesar Rp300.000.000,-

Tabel TC - 31
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88 Nilai	20.623.931.658	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota		*Nilai SAKIP Perangkat Daerah*	88 Nilai	23.879.204.398	
			Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3 Level				*Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)*	3 Level		
1	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja*	*6 Dokumen*	*200.000.000*	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja*	*11 Dokumen*	*750.000.000*	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	450.000.000	Penambahan Pagu Anggaran Sub Kegiatan

2	-	-	-	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50.000.000	Penambahan Sub Kegiatan baru

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	100.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	150.000.000	Penambahan Pagu Anggaran Sub Kegiatan
4	-	-	-	-	-	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Penambahan Sub Kegiatan baru
5	-	-	-	-	-	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000	Penambahan Sub Kegiatan baru
2	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel*	*3 Laporan*	*14.810.245.362*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel*	*5 Laporan*	*15.862.601.894*	

6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1260 Orang / bulan	14.400.864.962	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1176 Orang / bulan	15.608.271.494	Menyesuaikan Pagu Gaji tahun sebelummnya

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000	Pengurangan Pagu Anggaran Sub Kegiatan
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	309.380.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	204.330.400	Pengurangan Pagu Anggaran Sub Kegiatan
9	-	-	-	-	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	SKPD Inspektorat	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000	Penambahan Sub Kegiatan baru
3	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*		*Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah*	*1 Dokumen*	*40.800.000*	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*		*Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah*	*3 Dokumen*	*115.800.000*	

10	-	-	-	-	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Penambahan Sub Kegiatan baru

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	-	-	-	-	-	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000.000	Penambahan Sub Kegiatan baru
12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	40.800.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	40.800.000	
4	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*3 Dokumen*	*2.100.000.000*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*3 Dokumen*	*2.100.000.000*	
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	1.000.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	1.000.000.000	

14	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	100.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	100.000.000	
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	1.000.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	1.000.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*6 Layanan*	*981.833.340*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*6 Layanan*	*981.833.340*	
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	15.000.000	
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	166.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	166.000.000	
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.833.340	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.833.340	
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	500.000.000	

21	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250	Dokumen	100.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	350	Dokumen	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*30 Unit*	*500.000.000*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*30 Unit*	*500.000.000*	
22	-	-	-	-	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Pagu Anggaran belum tersedia
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	500.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	500.000.000	
7	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	*12 Bulan*	*1.091.052.956*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	*12 Bulan*	*2.668.969.164*	
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	270.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	420.000.000	Menyesuaikan Keperluan Pembayaran Listrik, Air dan Internet Kantor
25	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	671.052.956	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.098.969.164	Menyesuaikan Keperluan Inspektorat untuk pemenuhan Tenaga Ahli dan Outsourcing
8	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara*	*15 Unit*	*900.000.000*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara*	*15 Unit*	*900.000.000*	
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD Inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	250.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD Inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	250.000.000	
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKPD Inspektorat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	250.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKPD Inspektorat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	250.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	
30	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000	
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan		Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	97 Persen	10.200.000.000	Program Penyelenggaraan Pengawasan		Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	97 Persen	10.200.000.000	
9	*Penyelenggaraan Pengawasan Internal*		*Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pengawasan*	*77 Dokumen*	*8.500.000.000*	*Penyelenggaraan Pengawasan Internal*		*Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pengawasan*	*77 Dokumen*	*8.500.000.000*	
31	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	5 Laporan	1.250.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	5 Laporan	1.250.000.000	
32	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Laporan	1.250.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10 Laporan	1.500.000.000	Penyesuaian Target Kinerja dan Penambahan Pagu Sub Kegiatan

33	Reviu Laporan Kinerja	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	16 Laporan	1.500.000.000	Reviu Laporan Kinerja	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	16 Laporan	1.500.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Reviu Laporan Keuangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	1.500.000.000	Reviu Laporan Keuangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	1.250.000.000	Pengurangan Pagu Sub Kegiatan
35	Pengawasan Desa	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	38 Laporan	1.250.000.000	Pengawasan Desa	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	38 Laporan	1.250.000.000	
36	Kerjasama Pengawasan Internal	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	250.000.000	Kerjasama Pengawasan Internal	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	250.000.000	
37	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	1.500.000.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	1.500.000.000	
10	*Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*		*Jumlah dokumen Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*	*19 Dokumen*	*1.700.000.000*	*Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*		*Jumlah dokumen Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*	*19 Dokumen*	*1.700.000.000*	

38	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	200.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan	1.500.000.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan	1.500.000.000	
III	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP	85 Persen	3.500.000.000	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP	85 Persen	4.000.000.000	
11	*Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan*		*Jumlah dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan*	*4 Dokumen*	*800.000.000*	*Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan*		*Jumlah dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan*	*4 Dokumen*	*800.000.000*	
40	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	300.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	300.000.000	
41	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	3 Rekomendasi	500.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi	3 Rekomendasi	500.000.000	

			yang Disusun					Pengawasan yang Disusun			
12	*Pendampingan dan Asistensi*		*Jumlah dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi*	*85 Dokumen*	*2.700.000.000*	*Pendampingan dan Asistensi*		*Jumlah dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi*	*85 Dokumen*	*3.200.000.000*	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	56 Perangkat Daerah	1.200.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	58 Perangkat Daerah	1.500.000.000	Penyesuaian Target Kinerja dan Penambahan Pagu Sub Kegiatan
43	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	13 Perangkat Daerah	500.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	13 Perangkat Daerah	400.000.000	Penyesuaian Pagu Sub Kegiatan sesuai kebutuhan
44	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	500.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	1.000.000.000	Penyesuaian Pagu Sub Kegiatan sesuai kebutuhan

45	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 Perangkat Daerah	500.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 Perangkat Daerah	300.000.000	Penyesuaian Pagu Sub Kegiatan sesuai kebutuhan
Jumlah					34.323.931.658	Jumlah				38.079.204.398	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memiliki Usulan Program dan Kegiatan kepada Masyarakat.

Tabel TC - 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	-	-	-	-	Nihil

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini akan membahas tentang tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah yang akan dibandingkan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi melalui Inspektorat Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat atau Nasional. Proses tersebut dilakukan untuk melihat keselarasan antara tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang akan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Pusat atau Nasional.

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara seperti yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu sebagai perangkat daerah yang melakukan pembinaan dan pengawasan. Tugas pokok dan fungsi tersebut juga sama diampu oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dibutuhkan penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan baik di tingkat Daerah Kabupaten dan Provinsi yang akan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Pusat atau Nasional khususnya dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang sudah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pengendalian internal melalui pengukuran Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta pelaksanaan percepatan pemberantasan KKN seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Selain itu dari sisi anggaran juga sudah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai pedoman penganggaran kegiatan pengawasan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan 5 lima tahun. Berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, maka tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia" dan Misi "Memantapkan Birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani" maka ditetapkan tujuan yaitu "Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif, Innovatif dan Melayani".

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu tertentu, misalnya tahunan, semesteran, atau triwulanan.

Adapun sasaran untuk mewujudkan visi, misi serta tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Meningkatnya Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2025 yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan.

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan rumusan Progam dan Kegiatan.

   Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai Pengawas Pengelolaan Pembangunan daerah telah merumuskan Program dan kegiatan periode tahun 2021 – 2026 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

   Pemilihan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renja ini adalah merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran serta Rencana Strategis yang telah ditetapkan dan juga merupakan salah satu pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Dimana rumusan program dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah dengan menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

   Renja Kerja tahun 2025 ditetapkan 3 program yang telah disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang terbagi atas Program Prioritas yang merupakan program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah, dan Program Penunjang sebagai program kegiatan yang menopang Program Prioritas.

b. Uraian garis besar rekapitulasi Program dan Kegiatan yang terdiri dari :

   1. Program Prioritas.

      Rencana program prioritas yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025

sebanyak 2 program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 2 kegiatan 9 Sub Kegiatan dengan Pagu Indikatif sebesar Rp10.200.000.000,-
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terdiri dari 2 kegiatan 6 Sub Kegiatan dengan Pagu Indikatif sebesar Rp4.000.000.000,-

2. Program Penunjang.

   Selain Program Prioritas Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga di dukung dengan program penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 8 Kegiatan 29 Sub Kegiatan dengan Pagu Indikatif sebesar Rp23.879.204.398,-

c. Untuk Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah menyesuaikan pagu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota.

   a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

      Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD menyesuaikan pagu yang sebelumnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp309.380.400,- menjadi Rp204.330.400,-

   b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;

      Pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD telah mengalami penambahan pagu yang semula sebesar Rp30.000.000,- menjadi Rp40.800.000.

   c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

      Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik telah mengalami penambahan pagu yang semula sebesar Rp270.000.000,- menjadi Rp420.000.000,- berdasarkan

Keperluan Pembayaran Listrik, Air dan Internet Kantor sedangkan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor juga mengalami penambahan pagu semula sebesar Rp671.052.956,- menjadi Rp2.098.969.164,- atas keperluan Inspektorat untuk pemenuhan Jasa Tenaga Ahli dan Tenaga Outsourcing.

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diawal RKPD tidak teranggarkan, pasca fasilitasi pembahasan rancangan akhir RKPD telah dianggarkan dengan pagu Rp250.000.000,- atas keperluan Pemeliharaan dan pajak kendaraan Dinas Jabatan pada Inspektorat.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi pasca fasilitasi pembahasan rancangan akhir RKPD tidak mengalami perubahan baik pagu maupun target indikator kinerja.

d. Program/Kegiatan yang telah menambah Sub Kegiatan baru adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu Rp50.000.000 dan target kinerja 1 Laporan.

b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah dengan pagu Rp50.000.000 dan target kinerja 1 Dokumen.

c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu Rp50.000.000 dan target kinerja 1 Berita Acara.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan pagu Rp.25.000.000,- dan target kinerja 1 Dokumen.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah :

   a) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan pagu Rp25.000.000,- dan target kinerja 1 Dokumen.

   b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dengan pagu Rp50.000.000,- dan target kinerja 1 Laporan.

Tabel TC - 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD
Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah		88 Nilai	23.879.204.398			90 Nilai	20.623.931.658
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		3 Level				3 Level	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja*		*11 Dokumen*	*750.000.000*			*6 Dokumen*	*200.000.000*
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	5 Dokumen	450.000.000	APBD Kukar	Penyesuaian Target Kinerja dan Penambahan Pagu Sub Kegiatan	4 Dokumen	100.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	50.000.000	APBD Kukar	Penambahan Sub Kegiatan baru	-	-

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	3 Laporan	150.000.000	APBD Kukar	Penyesuaian Target Kinerja dan Penambahan Pagu Sub Kegiatan	3 Laporan	100.000.000

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	50.000.000	APBD Kukar	Penambahan Sub Kegiatan baru	-	-
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Berita Acara	50.000.000	APBD Kukar	Penambahan Sub Kegiatan baru	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel*		*5 Laporan*	*15.862.601.894*			*3 Laporan*	*14.810.245.362*
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD Inspektorat	1176 Orang / bulan	15.608.271.494	APBD Kukar	Menyesuaikan Pagu Gaji tahun sebelummnya	1176 Orang / bulan	14.400.864.962

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	25.000.000	APBD Kukar	Pengurangan Pagu Anggaran Sub Kegiatan	1 Laporan	100.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	SKPD Inspektorat	2 Laporan	204.330.400	APBD Kukar	Pengurangan Pagu Anggaran Sub Kegiatan	2 Laporan	309.380.400
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	25.000.000	APBD Kukar	Penambahan Sub Kegiatan baru	-	-

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah*		*3 Dokumen*	*115.800.000*			*1 Dokumen*	*40.800.000*
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	25.000.000	APBD Kukar	Penambahan Sub Kegiatan baru	-	-
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	50.000.000	APBD Kukar	Penambahan Sub Kegiatan baru	-	-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	SKPD Inspektorat	1 Laporan	40.800.000	APBD Kukar	-	1 Laporan	40.800.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*3 Dokumen*	*2.100.000.000*			*3 Dokumen*	*2.100.000.000*
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	50 Orang	1.000.000.000	APBD Kukar	-	30 Orang	1.000.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	75 Orang	100.000.000	APBD Kukar	-	35 Orang	100.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	55 Orang	1.000.000.000	APBD Kukar	-	35 Orang	1.000.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*6 Layanan*	*981.833.340*			*6 Layanan*	*981.833.340*
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	SKPD Inspektorat	1 Paket	15.000.000	APBD Kukar	-	1 Paket	15.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	SKPD Inspektorat	1 Paket	150.000.000	APBD Kukar	-	1 Paket	150.000.000

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	SKPD Inspektorat	3 Paket	166.000.000	APBD Kukar	-	3 Paket	166.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	SKPD Inspektorat	1 Paket	50.833.340	APBD Kukar	-	1 Paket	50.833.340
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	50 Laporan	500.000.000	APBD Kukar	-	50 Laporan	500.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	350 Dokumen	100.000.000	APBD Kukar	-	250 Dokumen	100.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*30 Unit*	*500.000.000*			*30 Unit*	*500.000.000*
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	SKPD Inspektorat	0 Unit	-	-	Pagu Anggaran belum tersedia	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	SKPD Inspektorat	30 Unit	500.000.000	APBD Kukar	-	30 Unit	500.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*		*12 Bulan*	*2.668.969.164*			*12 Bulan*	*1.091.052.956*
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	SKPD Inspektorat	12 Laporan	420.000.000	APBD Kukar	Menyesuaikan Keperluan Pembayaran Listrik, Air dan Internet Kantor	12 Laporan	270.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	SKPD Inspektorat	12 Laporan	150.000.000	APBD Kukar	-	12 Laporan	150.000.000

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	SKPD Inspektorat	12 Laporan	2.098.969.164	APBD Kukar	Menyesuaikan Keperluan Inspektorat untuk pemenuhan Jasa Tenaga Ahli dan Tenaga Outsourcing	12 Laporan	671.052.956
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara*		*15 Unit*	*900.000.000*			*15 Unit*	*900.000.000*
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	SKPD Inspektorat	6 Unit	250.000.000	APBD Kukar	-	6 Unit	250.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	SKPD Inspektorat	6 Unit	250.000.000	APBD Kukar	-	6 Unit	250.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	SKPD Inspektorat	1 Unit	200.000.000	APBD Kukar	-	1 Unit	200.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	SKPD Inspektorat	2 Unit	200.000.000	APBD Kukar	-	2 Unit	200.000.000
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan		97 Persen	10.200.000.000			97 Persen	10.200.000.000

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pengawasan*		*77 Dokumen*	*8.500.000.000*			*77 Dokumen*	*8.500.000.000*
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	5 Laporan	1.250.000.000	APBD Kukar	-	5 Laporan	1.250.000.000
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	10 Laporan	1.500.000.000	APBD Kukar	Penyesuaian Target Kinerja dan Penambahan Pagu Sub Kegiatan	10 Laporan	1.250.000.000
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	16 Laporan	1.500.000.000	APBD Kukar	-	16 Laporan	1.500.000.000
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	3 Laporan	1.250.000.000	APBD Kukar	Pengurangan Pagu Sub Kegiatan	3 Laporan	1.500.000.000
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	38 Laporan	1.250.000.000	APBD Kukar	-	38 Laporan	1.250.000.000
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	3 Kesepakatan	250.000.000	APBD Kukar	-	3 Kesepakatan	250.000.000
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	1.500.000.000	APBD Kukar	-	2 Dokumen	1.500.000.000
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah dokumen Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*		*19 Dokumen*	*1.700.000.000*			*19 Dokumen*	*1.700.000.000*

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	4 Laporan	200.000.000	APBD Kukar	-	4 Laporan	200.000.000
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	15 Laporan	1.500.000.000	APBD Kukar	-	15 Laporan	1.500.000.000
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan SPIP		85 Persen	4.000.000.000			100 Persen	3.500.000.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan*		*4 Dokumen*	*800.000.000*			*4 Dokumen*	*800.000.000*
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Rekomendasi	300.000.000	APBD Kukar		1 Rekomendasi	300.000.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	3 Rekomendasi	500.000.000	APBD Kukar		3 Rekomendasi	500.000.000
Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi*		*85 Dokumen*	*3.200.000.000*			*85 Dokumen*	*2.700.000.000*
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	58 Perangkat Daerah	1.500.000.000	APBD Kukar	Penyesuaian Target Kinerja dan Penambahan Pagu Sub Kegiatan	58 Perangkat Daerah	1.200.000.000

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	13 Perangkat Daerah	400.000.000	APBD Kukar	Penyesuaian Pagu Sub Kegiatan sesuai kebutuhan	13 Perangkat Daerah	500.000.000
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	4 Kegiatan	1.000.000.000	APBD Kukar	Penyesuaian Pagu Sub Kegiatan sesuai kebutuhan	4 Kegiatan	500.000.000
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	10 Perangkat Daerah	300.000.000	APBD Kukar	Penyesuaian Pagu Sub Kegiatan sesuai kebutuhan	10 Perangkat Daerah	500.000.000
JUMLAH				38.079.204.398				34.323.931.658

BAB V
PENUTUP

Beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 ini adalah sebagai berikut :

A. CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun langkah- langkah melalui tahapan kebijakan yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam periode tahun ini yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran dan fungsi sebagai APIP terkait penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) dan Konsultasi (*Consulting*) terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Meningkatkan peran dan fungsi sebagai APIP terkait *Early Warning System*.
3. Meningkatkan peran dan fungsi sebagai APIP terkait penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) dan Konsultasi (*Consulting*) terhadap laporan akuntabilitas kinerja PD.
4. Mengembangkan kapasitas, potensi dan kompetensi sumber daya manusia aparatur pengawas.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar operasional pengawasan.
6. Meningkatkan tunjangan aparatur pengawasan.
7. Mendorong salah satu *stakeholder* (masyarakat) untuk berperan serta dalam pengawasan.

B. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti kaidah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan selanjutnya Renja ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam tahun Anggaran 2025.

jj.RENJA KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan-kegiatan dengan tenteram, tertib dan teratur. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umumserta menegakkan Peraturan Daerah, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk mengemban tugas dan fungsinya kearah terselenggaranya kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Ketentraman dan ketertiban masyarakat. Seiring dengan semakin berkembangnya pembangunan, teknologi dan Sumber Daya Masyarakat, peran Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah strategis dalam mendukung jalannya pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam setiap pelaksanaan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja harus selalu mengedepankan azas kemanusiaan namun tetap tegas dalam bertindak. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Satuan Polisi Pamong Praja selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan Instansi terkait dan masyarakat dalam upaya menciptakan situasi yang tertib, tentram dan aman.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja merupakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2025. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 tersebut berupa dokumen perencanaan tahunan yang berisi tentang penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10 Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11 Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

16 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

17 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 adalah menyediakan acuan sebagai arah kebijakan progam dan kegiatan yang secara umum akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di tahun 2025, serta akan menjadi tolak ukur dan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada khususnya dan kinerja Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara pada umumnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nonmor 8 tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, mencakup :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja 2025 yang terdiri dari :

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja-PD, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja-

PD dengan dokumen RKPD, RENSTA-PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan penyusunan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RenjaD.

1.4. Sistematika Penulisan

Meguraikan pokok bahasan dalam penulisan RenjaD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA-PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun lalu (tahun n-2/2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA tahun-tahun sebelumnya.

Tabel T-C 29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun …. (tahun berjalan)*

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Tabel Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2025

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja-PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra-PD.

BAB IV RENCANA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan akhir RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Tabel rencana program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA-PD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA-PD

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026. Pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 2 program dan 34 kegiatan.

Berikut gambaran capaian realisasi program dan kegiatan :

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	VOLUME/ PAGU		TOTAL			STATUS PELAKSANAAN (%)
		K	Satuan	K	Satuan	%.	
1.05.1.05.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp304.811.000		Rp252.351.240		82,79%	
1	1.05.01.2.01.01.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dokumen	11	Dokumen	100,00%	100,00%
	1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Rp520.517.394		Rp330.868.164		63,57%	
2	1.05.01.2.01.06.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Kinerja OPD	15	Laporan	15	Laporan	100,00%	100,00%

1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp14.379.348.378		Rp10.787.794.564		75,02%	
3	1.05.01.2.02.01.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.988	Orang/Bulan	1.992	Orang/Bulan	100,20%	100,00%

	1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD		Rp32.763.600		Rp26.548.000	81,03%	
4	1.05.01.2.02.05.01 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	1	Laporan	1	Laporan	100,00%	100,00%
	1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD		Rp175.048.000		Rp172.453.700	98,52%	
5	1.05.01.2.02.07.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD	15	Laporan	15	Laporan	100,00%	100,00%
	1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
	1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Rp260.438.000		Rp256.014.000	98,30%	
6	1.05.01.2.05.02.01 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	1	Paket	100,00%	100,00%
	1.05.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Rp19.580.000		Rp16.038.150	81,91%	
7	1.05.01.2.05.03.01 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10	Dokumen	10	Dokumen	100,00%	100,00%
	1.05.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp120.000.000		Rp113.362.078	94,47%	
8	1.05.01.2.05.09.01 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang	6	Orang	30,00%	100,00%
	1.05.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan		Rp23.710.066		Rp23.662.250	99,80%	

Perundang- Undangan							
9	1.05.01.2.05.10.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	50	Orang	100,00%	100,00%
1.05.01.2.06 Adminstrasi Umum Perangkat Daerah							
1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp80.000.000		Rp77.928.150		97,41%	
10	1.05.01.2.06.02.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	67	Paket	67	Paket	100,00%	100,00%
1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp227.172.000		Rp191.931.500		84,49%	
11	1.05.01.2.06.04.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6	Paket	6	Paket	100,00%	100,00%
1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan		Rp20.011.290		Rp20.011.200		100,00%	
12	1.05.01.2.06.05.01 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	Paket	2	Paket	50,00%	100,00%
1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan OPD		Rp535.173.000		Rp503.055.516		94,00%	
13	1.05.01.2.06.09.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kosnultasi OPD	90	Laporan	126	Laporan	140,00%	100,00%

1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
1.05.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp2.250.000.000		Rp2.063.958.000		91,73%	
14	1.05.01.2.07.02.01 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang telah disediakan	6	Unit	6	Unit	100,00%	100,00%
1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp2.743.327.000		Rp2.424.010.000		88,36%	
15	1.05.01.2.07.10.01 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	118	Unit	84	Unit	71,19%	100,00%
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp4.015.000		Rp4.010.000		99,88%	
16	1.05.01.2.08.01.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp114.828.000		Rp93.583.920		81,50%	
17	1.05.01.2.08.02.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp38.800.000		Rp38.800.000		100,00%	
18	1.05.01.2.08.03.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp6.757.723.908		Rp6.651.315.531		98,43%	
19	1.05.01.2.08.04.03 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	100,00%

	yang Disediakan						
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1.05.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Rp35.000.000		Rp34.950.000		99,86%	
20	1.05.01.2.09.08.01 Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Unit	1	Unit	100,00%	100,00%
1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp463.054.000		Rp269.320.050		58,16%	
21	1.05.01.2.09.09.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2	Unit	100,00%	100,00%
1.05.02.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp974.355.000		Rp834.274.660		85,62%	
22	1.05.02.2.09.02.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	82	Unit	82	Unit	100,00%	100,00%
1.05.1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum							
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							

1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan, Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		Rp325.698.000		Rp315.192.000		96,77%	
23	1.05.02.2.01.01.01 Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.484	Kasus	1.484	Kasus	100,00%	100,00%
1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Rp17.478.000		Rp17.478.000		100,00%	
25	1.05.02.2.01.03.01 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00%	100,00%
1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Rp11.060.537.700		Rp9.493.733.094		85,83%	
26	1.05.02.2.01.04.01 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	68	Dokumen	68	Dokumen	100,00%	100,00%
1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Rp520.000.000		Rp468.798.059		90,15%	

27	1.05.02.2.01.05.01 Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	148	Dokumen	148	Dokumen	100,00%	100,00%
1.05.02.2.01.06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Rp23.483.300		Rp23.444.300		99,83%	
28	1.05.02.2.01.06.01 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5	Dokumen	5	Dokumen	100,00%	100,00%
1.05.02.2.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada		Rp10.000.000		Rp0		0,00%	
29	1.05.02.2.01.09.01 Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							
1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota		Rp190.867.500		Rp166.232.800		87,09%	
30	1.05.02.2.02.01.01 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	8	Laporan	8	Laporan	100,00%	100,00%

1.05.02.2.02.02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Rp72.320.000		Rp71.216.000		98,47%	
31	1.05.02.2.02.02.01 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	125	Laporan	125	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Rp157.102.400		Rp111.208.500		70,79%	
32	1.05.02.2.02.03.01 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	125	Laporan	57	Laporan	45,60%	100,00%
1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota							
1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Rp170.000.000		Rp24.917.280		14,66%	
33	1.05.02.2.03.01.01 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1	Laporan	0	Laporan	0,00%	100,00%

2. Realisasi program/kegiatan yang tidak mernenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	VOLUME/ PAGU		TOTAL			STATUS PELAKSANAAN (%)
		K	Satuan	K	Satuan	%.	
1.05.1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum							
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							

1.05.02.2.01.02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa		Rp50.000.000		Rp0		0,00%		
1	1.05.02.2.01.02.01 Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	Kasus	4	Kasus	33,33%	80,00 %	

3. Secara umum, Satuan Polisi Pamong Praja dapat memenuhi target kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, terdapat 33 kegiatan yang sesuai target dan 1 kegiatan yang tidak memenuhi target.

   Dalam meningkatkan capaian kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan monitoring dan evaluasi berkala setiap 3 bulan. Hasil dari montoring ini adalah 33 kegiatan yang direncanakan berhasil dilaksanakan sesuai target.

   Disamping keberhasilan tersebut, masih ada 1 kegiatan yang gagal mencapai target, penyebabnya adalah kesalahan dalam penetapan target akhir. Subkegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa adalah kegiatan yang realisasinya berdasarkan kejadian kondisional di masyarakat, sehingga tidak dapat diperkirakan jumlah kasus yang akan terjadi.

   Berdasarkan data realisasi diatas, maka tabel II.1 (T-C.29) berikut akan menggambarkan perbandingan antara evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dengan pencapaian RENSTRA OPD.

Tabel II.1 (T-C. 29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022) (akumulasi dari tahun 2021-2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2023)				Target program dan kegiatan (RenjaD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)		
							Target RENJAD tahun (2023)	Realisasi RENJAD Tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7		8=7/6	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Urusan Wajib Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat													
	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah penurunan angka penanganan gangguan trantibum	5000	angka										
	1 Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui	Jumlah peningkatan pencegahan gangguan trantibum	9610	angka	1984	Dokumen	1484	1484	Kasus	100%	1484	4952	Kasus	52%

	deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan													
2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Presentase peningkatan gangguan trantibum	100	Persen	0	Persen	100	0	Persen	0%	0	0	Persen	0%
3	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	20	Kali	11	dokumen	4	0	dokumen	100%	4	15	kali	75%

4	Pemberdayaan perlilndungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah regu perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	125	regu	50	regu	25	25	regu	100%	25	100	Regu	80%
5	Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Jumlah satpol yang bersertifikat	1000	orang	460	orang	200	0	Orang	80%	160	620	Orang	100%
6	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen kesepakatan kerjasama	25	dokumen	0	Dokumen	5	5	Dokumen	100%	5	10	Dokumen	40%
7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah sarana dan prasarana trantibum yang dipelihara	150	unit	0	Unit	30	18	Unit	60%	18	36	Unit	24%

8	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah dokumen SOP trantibum	3	dokumen	0	persen	1	1	Persen	100%	1	2	Persen	67%
9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada	Persentase layanan dampak penegakan perda	100	persen	0	Dokumen	100	100	Dokumen	100%	100	200	Dokumen	100%
Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota		Jumlah perda yang ditegakkan	14	angka										
10	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah frekuensi sosialisasi perda/perkada	20	kali	0	Kali	4	4	Kali	100&	4	8	kali	100%
11	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah temuan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	500	pelanggaran	204	objek	150	150	Kasus	100%	150	504	Kasus	99%
12	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditindaklanjuti	500	kali	95	Penegakan perda	150	0	Penegakan perda	47%	70	315	Kasus	100%

Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kabupaten/kota		Jumlah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kabupaten/kota yang dibina	5	orang										
13	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja yang bersertifikat PPNS	5	orang	1	Orang	1	1	Orang	100%	1	3	Orang	100%
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah dokumen rencana anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	130	dokumen										
14	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	55	dokumen	0	dokumen	11	11	Dokumen	100%	11	22	Dokumen	100%
15	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	75	Dokumen	30	dokumen	15	15	Dokumen	86%	12	57	Laporan	100%
Administrasi keuangan perangkat daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang	85	dokumen										

		akuntabel													
16	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	9900	orang	1776	Orang/bulan	1980	12	Orang/bulan	67%	1338	5094	Orang	100%
17	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun OPD	9900	orang	0	dokumen	1	1	Dokumen	100%	1	2	Dokumen	100%
18	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	75	dokumen	30	dokumen	15	15	Dokumen	86%	13	58	Laporan	100%
Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Jumlah laporan administrasi kepegawaian	62	dokumen										
19	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Junlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	125	stel	111	buah	1	0	buah	100%	1	112	Paket	100%

20	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	50	dokumen	11	dokumen	10	1	Dokumen	100%	10	22	Dokumen	100%
21	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	40	orang	0	orang	20	20	Orang	100%	20	40	orang	100%
22	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan-undangan	250	orang										

Administrasi umum perangkat daerah		Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	30	layanan										
23	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	335	jenis	95	Rim/ buah/ kotak	67	61	Rim/ buah/ kotak	100%	67	223	Paket	100%
24	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	105	jenis	26	jenis	5	38	jenis	100%	5	69	Paket	100%

25	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan penggandaan yang disediakan	35	jenis	9	paket	7	24.340	Paket	28%	2	24.351	Paket	100%
26	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan advetorial yang disediakan	300	exemplar										
27	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi OPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi OPD yang diselenggarakan	1125	orang	254	orang	167	56	orang	80%	135	445	Laporan	100%
28	Penatausahaan arsip dinamis pada OPD	Jumlah arsip pada unit pencipta pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan	1671	Berkas	0	arsip								
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah	100	persen										
29	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan operasional kantor yang tersedia	2	unit	0	Unit								

30	pengadaan mabel	jumlah mabel kantor yang tersedia	6	unit	0	unit									
31	Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang tersedia	2	paket											

32	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang tersedia	24	unit	109	unit	28	0	unit	100%	28	137	Unit	18%
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	60	bulan											
33	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat	60	Bulan	24	lembar	12	715	Lembar	100%	12	751	Lembar	8%
34	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Bulan	12	rekening	12	12	rekening	100%	12	36	Bulan	100%

35	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60	bulan	24	bulan	12	6	Bulan	100%	12	42	Bulan	100%
36	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor 2.penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	60	1. bulan 2. bulan	24	bulan	1. 12 2. 12	11	bulan	75%	1. 9 2. 9	44	bulan	100%
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah barang milik daerah	425	unit										
37	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang mendapatkan pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak	405	unit	160	unit	81	78	Unit	100%	81	319	Unit	100%
38	Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	10	unit	0	Unit	2	2	Unit	100%	2	4	Unit	100%
39	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10	unit	4	gedung	2	2	gedung	100%	2	8	Unit	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dapat dijabarkan dalam bentuk capaian Indikator :

1. IKU (Kinerja Utama),
2. SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan
3. IKK (Indikator Kinerja Kunci) .

Target pada masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Target IKU :

No	IKU	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	jumlah pelanggaran produk hukum daerah	Kasus	1200	1100	1000	900	800
Keterangan : Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA meningkat jika terjadi penurunan angka sebesar 100 kasus dalam setiap tahunnya memalui penindakan TIPIRING.								

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 :

No	IKU	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Target 2023
1	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	jumlah pelanggaran produk hukum daerah	Kasus	1200	1265	1100
Analisis : Target penurunan angka pelanggaran adalah 100 kasus setiap tahunnya, pada tahun 2023, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA hanya mampu melakukan tindakan TIPIRING sebabyak 35 kasus, sehingga target 100 kasus tidak tercapai. Hal disebabkan antara lain : 1. kerjasama antar instansi vertikal yaitu SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, Kejaksaan dan Kehakiman belum terjalin dengan maksimal. 2. Keterlambatan melaksanakan kegiatan yustisial TIPIRING, sehingga waktu pelaksanaan tidak cukup banyak.						

2.2.2. SPM (Standar Pelayanan Minimal) Target SPM :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Persen	100	100	100	100	100

Capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Tahun 2023 :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Target 2023
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Persen	100	100	100

Analisis :

Dalam melaksanakan penegakan Perda dan Perkada, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA selalu mengepankan tindakan persuasif dan humanis, sehingga sepanjang tahun 2022 tidak terdapat warga negara yang merasa dirugikan baik secara moril maupun materiil.

2.2.3. IKK (Indikator Kinerja Kunci) Target dan Realisasi IKK :

No	IKK Outcome	IKK Output	Target	Rumus	Realisasi 2023	
1	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan		100%	1. Jumlah Pengaduan Yang ditangani	29	100%
				2. Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang Masuk	29	
		1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	1484		1484	
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan	3090		3090	
		3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	60		45	

		4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	1		10	
		6. Tersedianya sarana prasarana minimal	552		552	
2	Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan		43%	1. Jumlah Perda/Perkada yang Memuat Sanksi yang Ditegakkan	45	
				2. Jumlah Keseluruhan Perda Dan Perkada Yang Memuatsanksi	60	75%

Dalam pelaksanaan kewenangan , tugas pokok dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Daerah dengan ruang lingkup Pembinaan dan Pendekatan pada perorangan / kelompok masyarakat, dan Penindakan Preventive non yustisial (Surat Teguran). Dibidang Penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat ruang lingkupnya meliputi Pengamanan, tempat, aset daerah, Pengerahan anggota dalam pengamanan dan pemantauan dalam penanganan unjuk rasa / demo, konflik sosial dll, Terlaksananya pengamanan (PAM) dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala masal, Terlaksananya pengakhiran dan pengamanan penjabat negara, daerah, tamu VIP, VVIP, negara, dan daerah, Penertiban, pengawasan, pengendalian dan pengamanan pemasukan pajak daerah, sumber PAD, serta objek vital daerah.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		12	13
1	jumlah pelanggaran produk hukum daerah			1300	1200	1100	1000	1300	1265	1100	1000	
4		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Capaian Tahun 2023 100% karena tidak ada warga negara yang melakukan pengaduan akibat penegakan hukum perda/perkada
5			(IKK Outcome) Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Pengaduan Yang ditangani (30) Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang Masuk (30)
6			(IKK) 1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum	1484	1484	1484	1849	1484	1484	1484	1849	

			dalam Kab/Kota yang ditangani									
7			2. Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan					0	3090			
8			3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		49	60	60	17	45	60	60	
9			4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS					5	5	10	10	
10			5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum 6. Tersedianya sarana prasarana minimal					5 552	5 552	6 554	6 554	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD

Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja adalah Menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan. Secara umum, setiap tahun kinerja pelayanan trantibum selalu bernilai 100%, hal ini berarti Satuan Polisi Pamong Praja selalu melakukan tugasnya dengan maksimal. Akan tetapi, keberhasilan tersebut tidak menyebabkan angka pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) di wilayah Kutai Kartanegara berkurang, ini berarti tugas pelayanan trantibum oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak membawa dampak yang optimal.

Beberapa hal yang menyebabkan hal ini terjadi antara lain adalah mutu pelayanan trantibum anggota dalam penegakan trantibum masih rendah, sarana dan prasarana penegakan perda belum optimal, lokasi pelanggaran trantibum sulit dijangkau, kurangnya sosialisasi mengenai K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) di masyarakat dan kerjasama antar Instansi terkait belum terjalin optimal.

Isu-isu strategis, tantangan dan peluang yang harus disikapi Satuan Polisi Pamong Praja untuk perencanaan kinerja pada tahun-tahun berikutnya adalah antara lain Kutai Kartanegara memiliki 60 perda/perkada yang memuat sanksi, cakupan luas wilayah Kutai Kutai Kartanegara yang sangat besar. Antar kecamatan harus ditempuh dengan waktu sampai lebih dari dua jam, di setiap Kecamatan terdapat Seksi Trantib, akan tetapi tugas pelayanan trantibum tidak dapat dilakukan dengan maksimal karena Seksi Trantib Kecamatan hanya berfungsi secara koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, disamping itu, sangat perlu untuk melakukan analisis Pendidikan dan pelatihan yang mendukung ke arah pelayanan penegakan trantibum yang berdampa pada penurunan angka pelanggaran trantibum dan perda.

Langkah-langkah yang harus diambil Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyikapi isu strategis, tantangan dan peluang tersebut adalah percepatan Langkah dan akselerasi dalam mencapai target kinerja, penguatan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di masyarakat dan penguatan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis sumber daya anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah pedoman bagi seluruh pemerintah daerah untuk mewujudkan single codebase, berupa penggolongan atau pengelompokan dan pemberian kode. Disamping itu sebagai daftar penamaan untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban untuk pelaporan kinerja dan keuangan. sejak terbitnya Permendagri dan Kepmendagri tersebut, maka berpengaruh juga terhadap perencanaan kegiatan dan penganggaran. Berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, maka program menjadi satu program utama yaitu Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.

Dari hasil review, melakukan beberapa perubahan pada subkegiatan baik perubahan volume maupun anggaran, antara lain sebagai berikut :

1. SubKegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengakhiran, perubahan anggaran semula Rp325.698.000 menjadi Rp1.628.240.000, penambahan anggaran ini karena tugas meliputi 20 kecamatan, kegiatan ini juga meliputi tugas-tugas pengakhiran dan pengamanan baik pejabat maupun acara-acara penting daerah.
2. SubKegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota, perubahan anggaran semula Rp17.478.000 menjadi Rp100.000.000, penambahan anggaran ini karena tugas meliputi 20 kecamatan.

3. SubKegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS, perubahan anggaran semula Rp60.000.000 menjadi Rp150.000.000, penambahan anggaran ini karena target semula hanya 1 orang, menjadi 3 orang peserta diklat PPNS.Hasil penjabaran Program dan Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 90 tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel T-C.31 (Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2025) berikut :

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Sebagai pengemban amanat penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki program dan kegiatan yang bersifat usulan dari Para Pemangku Kepentingan.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
					tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat terhadap SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2021-2025 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara- negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2021-2025 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2021-2025 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJM Nasional tahun 2021-2025 sebagai berikut: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari pada Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan secara nasional dibawah Kementrian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan dari pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian

Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri mampu Menjadi poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”, dan Misi no 2 yaitu Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

Satuan Polisi

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	43	persen	1.092.476.700	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	43%	2.038.240.000	
			Persentase Penanganan Gangguan K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	100	persen				Persentase Penanganan Gangguan K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	100%		
1	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		jumlah penurunan angka penanganan gangguan trantibum	1100	kasus	612.186.800	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		jumlah penurunan angka penanganan gangguan trantibum	1100	1.888.240.000	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kutai Kartan e gara	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1484	kasus	325.698.000		1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kutai Kartan e gara	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1484	1.628.240.000	- Pelaksanaan Patroli di 20 kecamatan - Pengawalan Bupati dan Pejabat Penting Daerah - Penambahan jumlah personil di setiap kegiatan pengamanan
	2	1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan	Kutai Kartan e gara	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan	12	kasus	50.000.000	0	1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kutai Kartan e gara	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	50.000.000	

		Massa		Penindakan										

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
	3	1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4	Dokumen	17.478.000	0	1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2	100.000.000		
	4	1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25	Dokumen	75.527.500		1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25	-		

	5	1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kutai Kartanegara	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200	Orang	100.000.000	1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kutai Kartanegara	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200	-	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	6	1.05.02.2.01.06 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5	Dokumen	23.483.300	1.05.02.2.01.06 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kutai Kartane gara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	24	100.000.000	kerjasama dengan 24 Instansi terkait penegakan perda
	7	1.05.02.2.01.08 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Satpol PP	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1	Dokumen	10.000.000	1.05.02.2.01.08 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Satpol PP	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1	-	
	8	1.05.02.2.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	100	Laporan	10.000.000	1.05.02.2.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	100	10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	jumlah perda yang ditegakkan	3	angka	420.289.900	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	jumlah perda yang ditegakkan	3	-	
	9 1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompo k Masyarakat/Pelaku Usaha	4	Laporan	97.767.500	1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	20	-	
	10 1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100	Laporan	120.000.000	1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	150	-	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	11	1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	100	Laporan	202.522.400	1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	100	-	
	1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina	1	orang	60.000.000	1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina	1	150.000.000	
	12	1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1	Laporan	60.000.000	1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	3	150.000.000	menambahan target menjadi 3 orang PPNS

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		nilai SAKIP Perangkat Daerah	76		23.247.159.222	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		nilai SAKIP Perangkat Daerah	76	28.977.414.726	
	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26	dokumen	140.000.000	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26	1.000.000.000	
	13 1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial	Kantor SATPOL PP	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Dokumen		1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial	Kantor SATPOL PP	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	50.000.000	penguatan pelaksanaan satudata KUKAR
	14 1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Kantor SATPOL PP	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		Dokumen		1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Kantor SATPOL PP	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	16	250.000.000	penguatan pelaksanaan satudata KUKAR

	15	1.05.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Berita Acara			1.05.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31	50.000.000	penguatan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	16	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	dokumen	70.000.000	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	450.000.000	pergeseran 25.000.000 dari Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
	17	1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	laporan	70.000.000	1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	50.000.000	bertambahnya data-data dan aplikasi yang harus dilengkapi, sehingga perlu penambahan rapat-rapat baik internal dan mengundang narasumber
	18	1.05.01.2.01.06 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		1.05.01.2.01.06 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	150.000.000	penguatan kualitas dokumen capaian kinerja

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	17	dokumen	15.120.160.065	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	17	17.094.051.969		
	19	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor SATPOL PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1980	dokumen	14.998.354.465	0	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1980	16.969.051.969		
	20	1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	21.805.600		1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	25.000.000	bertambahnya data-data dan aplikasi yang harus dilengkapi, sehingga perlu penambahan rapat-rapat baik internal dan mengundang narasumber	
	21	1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	15	laporan	100.000.000		1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Sem	15	100.000.000	honorarium PA, Bendahara, 5 KPA, 5 Bendahara Pembantu, PP Keuangan, PP Barang	

											esteran SKPD			
	22	1.05.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kantor SATPOL PP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		dokumen			1.05.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kantor SATPOL PP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	25.000.000	Penguatan dokumen analisis prognosis

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	
	1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Jumlah laporan Administrasi Pengelolaan Barang Perangkat Daerah yang akuntabel		dokumen	-	1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Jumlah laporan Administrasi Pengelolaan Barang Perangkat Daerah yang akuntabel			105.000.000	
	23	1.05.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor SATPOL PP	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen			1.05.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor SATPOL PP	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1		25.000.000	
	24	1.05.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		laporan			1.05.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1		50.000.000	
	25	1.05.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		laporan			1.05.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1		30.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	13	dokumen	43.290.066	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja	100%	2.493.290.066	
	26	1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50	Paket	160.000.000		1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50	2.430.000.000	
	27	1.05.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor SATPOL PP	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10	dokumen	19.580.000		1.05.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor SATPOL PP	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10	19.580.000	
	28	1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang	20.000.000		1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	20.000.000,00	
	29	1.05.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor SATPOL PP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	50	Orang	23.710.066		1.05.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor SATPOL PP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	23.710.066	

			Undangan											

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	
	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	layan a n	205.312.900	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6		606.031.500	
	30	1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. KUKAR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	67	paket	80.000.000		1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. KUKAR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	67		200.000.000	mengakomodir kebutuhan Bidang2
	31	1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. KUKAR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21	paket	44.600.000		1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. KUKAR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21		100.000.000	Penyesuaian dengan Kebutuhan dan kenaikan biaya
	32	1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. KUKAR	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	paket	6.031.500		1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. KUKAR	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7		6.031.500	Penyesuaian dengan Kebutuhan dan kenaikan biaya
		1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. KUKAR	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	dokum en	9.216.400	0	1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. KUKAR	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60		-	
	33	1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	225	lapor a n	65.465.000		1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225		300.000.000	

		Konsultasi SKPD		SKPD					SKPD					
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		dokumen			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		-	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	bulan	7.285.987.192	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	7.095.987.192	
	34	1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	4.015.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	4.015.000	
	35	1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. KUKAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	100.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. KUKAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	100.000.000	
	36	1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. KUKAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	laporan	25.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. KUKAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	25.000.000	
	37	1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	7.156.972.192	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	6.966.972.192	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	22%	unit	452.409.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP		Jumlah Barang Milik Daerah	21,87%	98.053.999	
38	1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor SATPOL PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81	unit	354.355.000	1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor SATPOL PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81	-	Kenaikan Harga BBM, Sparepart dan Pajak
39	1.05.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kantor SATPOL PP	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2	unit	20.000.000	1.05.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kantor SATPOL PP	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	20.000.000	
40	1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor SATPOL PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	2	unit	78.054.000	1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor SATPOL PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	78.053.999	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kantor SATPOL PP	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	persen	90.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	590.000.000	
	41	1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. KUKAR	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	unit	90.000.000	1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. KUKAR	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	90.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	42	1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. KUKAR	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	unit	250.000.000	1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. KUKAR	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	250.000.000	
	43	1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. KUKAR	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	250.000.000	1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. KUKAR	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	250.000.000	
							24.339.635.922					31.015.654.726	

Dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda, sebagai pelaksana dilapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 148, 149 UU No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun wewenang Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor: 6 tahuh 2010 Bab III pasal 6. Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 88 tahun 2012, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja

Isu strategis dalam Renstra 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja adalah pemenuhan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang lebih berorientasi pada hasil dan dampak. Sehingga dengan target tersebut, ketentraman, ketertiban dan keindahan dapat diwujudkan di Kutai Kartanegara.

Arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyikapi isu strategis tersebut adalah percepatan Langkah dan akselerasi dalam mencapai target kinerja, penguatan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di masyarakat dan penguatan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis sumber daya anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel III.5

tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	jumlah pelanggaran produk hukum daerah	melaksanakan penegakan perda/perkada (tipiring) bekerjasama dengan Instansi terkait (TNI POLRI KEJAKSAAN KEHAKIMAN)	melaksanakan penegakan perda/perkada melalui proses penyidikan dan penyelidikan dengan memberdayakan PPNS sampai ke tahap persidangan tipiring
					melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan Perda dan Perkada
				Melaksanakan patroli dan deteksi dini	melaksanakan pengawasan pelanggaran perda dan perkada
					membentuk regu-regu kesiap-siagaan dini.
					Membuat aplikasi layanan Satuan Polisi Pamong Praja siaga
				Melaksanakan peingkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	melaksanakan diklat mengenai penegakan perda secara berkala

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Visi RPJMD Kab.Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 "*Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia*". Selanjutnya Visi dan misi RPJMD Kab.Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran. Misi pertama adalah, "Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani", dengan Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA), merupakan Program Dedikasi Kukar IDAMAN, yang ditujukan untuk membangun mindset dan culturset tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektil efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

   Pada perencanaan untuk tahun 2025, sesuai dengan hasil analisa kebutuhan, maka Satuan Polisi Pamong Praja merencanakan 2 program, 11 kegiatan dan 52 subkegiatan. Sebagai OPD yang bertanggungjawab terhadap penegakan perda, maka kegiatan yang berhubungan dengan msyarakat juga bersentuhan dengan tugas pokok itu sendiri seperti penertiban jalur hijau serta jalan utama dari PKL di kecamatan tenggarong, loa kulu dan loa janan, penegakan perda seperti perda KTP, Perda Miras dan Perda Prostitusi di wilayah Sanga-Sanga, Muara Jawa, Samboja, Kota Bangun dan Tenggarong Seberang. Juga terdapat penertiban Perijinan baik itu IMB maupun ijin usaha yang terfokus di kecamatan Tenggarong, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Muara Jawa, Samboja dan Sanga-Sanga. Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan patroli rutin di seluruh wilayah Kutai Kartanegara untuk menjaga ketertiban, keamanan dan keindahan (K3). Disamping itu, Satuan Polisi Pamong Praja juga akan melakukan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat mengenai ketertiban, keamanan dan keindahan (K3) serta penanggulangan bencana.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
   Tahun anggaran 2025, Satuan Polisi Pamong Praja akan melaksanakan 2 program, 11 Kegiatan dan 52 Subkegiatan dengan pagu sebesar Rp31.145.654.726,-.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Beberapa subkegiatan tersebut, terutama yang berhubungan dengan tugas utama Satuan Polisi Pamong Praja, mengalami kenaikan pagu seperti :
   3.1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan, dari pagu Rp325.698.000 menjadi 1.628.240.000, hal ini karena luasnya cakupan ruang lingkup kegiatan yang meliputi Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.
   3.2. Penambahan subkegiatan baru di kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   3.3. Penambahan Kegiatan baru yaitu Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terdiri dari subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah OPD, Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah OPD dan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada OPD.
4. Tabel Rencana program dan kegiatan
   Berikut disajikan tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		43 persen	2.038.240.000			43	persen	1.082.476.700
		Persentase Penanganan Gangguan K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)		100 persen				100	persen	
1	I 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penurunan angka penanganan gangguan trantibum		1100 kasus	1.888.240.000	APBD		1100	kasus	602.186.800

		1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kutai Kartanegara	1484	kasus	1.628.240.000	APBD	- Pelaksanaan Patroli di 20 kecamatan - Pengawalan Bupati dan Pejabat Penting Daerah - Penambahan jumlah personil di setiap kegiatan pengamanan	1484	kasus	325.698.000
		1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kutai Kartanegara	12	kasus	50.000.000	APBD		12	kasus	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
	1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	2 Dokumen	100.000.000	APBD		4	Dokumen	17.478.000
	1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kutai Kartanegara	25 Dokumen	-	APBD		25	Dokumen	75.527.500
	1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kutai Kartanegara	200 Orang	-	APBD		200	Orang	100.000.000

		1.05.02.2.01.06 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kutai Kartanegara	24	Dokumen	100.000.000	APBD	kerjasama dengan 24 Instansi terkait penegakan perda	5	Dokumen	23.483.300
		1.05.02.2.01.08 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Satpol PP	1	Dokumen	-	APBD		1	Dokumen	-
		1.05.02.2.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Satpol PP	100	Laporan	10.000.000	APBD		100	Laporan	10.000.000
	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan		jumlah perda yang ditegakkan	Kab Kukar	3	angka	-	APBD		3	angka	420.289.900

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
	1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Kab Kukar	20	Laporan	-	APBD	sosialisasi perda dilaksanakan di 20 kecamatan	4 Laporan	97.767.500
	1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	150	Laporan	-	APBD	penambahan honor anggota Cipkon	100 Laporan	120.000.000
	1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kab Kukar	100	Laporan	-	APBD	Penambahan Honor Tim Tipiring, penambahan SPPD	100 Laporan	202.522.400
	1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)		1	orang	150.000.000	APBD		1 orang	60.000.000

		Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang dibina									
		1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Kantor SATPOL PP	3	Laporan	150.000.000	APBD	menambahan target menjadi 3 orang PPNS	1	Laporan	60.000.000
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		nilai SAKIP Perangkat Daerah		76		29.107.414.726			76		23.509.652.756
		1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		26	dokumen	1.000.000.000	APBD		26	dokumen	620.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
	1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kantor SATPOL PP	1	Dokume n	50.000.000	APBD	penguatan pelaksanaan satudata KUKAR	1 Dokumen	50.000.000
	1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	16	Dokume n	250.000.000	APBD	penguatan pelaksanaan satudata KUKAR	16 Dokumen	230.000.000
	1.05.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	31	Berita Acara	50.000.000	APBD	penguatan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31 Berita Acara	50.000.000
	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	11	dokumen	450.000.000	APBD	pergeseran 25.000.000 dari Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	11 dokumen	70.000.000

		1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor SATPOL PP	15	laporan	50.000.000	APBD	bertambahnya data-data dan aplikasi yang harus dilengkapi, sehingga perlu penambahan rapat-rapat baik internal dan mengundang narasumber	15	laporan	70.000.000
		1.05.01.2.01.06 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	1	laporan	150.000.000,00	APBD	penguatan kualitas dokumen capaian kinerja	1	laporan	150.000.000,00
		1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		17	dokumen	17.119.051.969	APBD		17	dokumen	15.145.160.065

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor SATPOL PP	1980 dokumen	16.969.051.969	APBD		1980	dokumen	14.998.354.465
	1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor SATPOL PP	1 laporan	25.000.000	APBD	bertambahnya data-data dan aplikasi yang harus dilengkapi, sehingga perlu penambahan rapat-rapat baik internal dan mengundang narasumber	1	laporan	21.805.600
	1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	Kantor SATPOL PP	15 laporan	100.000.000	APBD	honorarium PA, Bendahara, 5 KPA, 5 Bendahara Pembantu, PP Keuangan, PP Barang	15	laporan	100.000.000
	1.05.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kantor SATPOL PP	1 dokumen	25.000.000	APBD	Penguatan dokumen analisis prognosis	1	dokumen	25.000.000

	1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					105.000.000					
	1.05.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor SATPOL PP	1	dokumen	25.000.000	APBD		1	dokumen	25.000.000
	1.05.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kantor SATPOL PP	1	laporan	50.000.000	APBD		1	laporan	50.000.000
	1.05.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor SATPOL PP	1	laporan	30.000.000	APBD		1	laporan	30.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		100%	dokumen	2.493.290.066	APBD		13	dokumen	63.290.066
	1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		50	Paket	2.430.000.000	APBD		50	Paket	160.000.000
	1.05.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor SATPOL PP	10	dokumen	19.580.000	APBD		10	dokumen	19.580.000
	1.05.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20.000.000					20.000.000
	1.05.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor SATPOL PP	50	Orang	23.710.066	APBD		50	Orang	23.710.066
	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		6	layanan	606.031.500	APBD		6	layanan	196.096.500
	1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. KUKA	67	paket	200.000.000	APBD		67	paket	80.000.000

		Kantor	yang Disediakan	R								
		1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. KUKAR	21	paket	100.000.000	APBD		21	paket	44.600.000
		1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. KUKAR	7	paket	6.031.500	APBD		7	paket	6.031.500
		1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		225	laporan	300.000.000	APBD		225	laporan	65.465.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		8 dokumen	-	APBD	Dengan memperhatikan tingkat urgensi, kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD yang sempat dihilangkan dalam 2 tahun anggaran, diusulkan kembali di APBD Perubahan TA 2024. Adapun usulan besaran dananya sbb:		dokumen	
	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 bulan	7.095.987.192	APBD		12	bulan	7.095.987.192
	1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 laporan	4.015.000	APBD		12	laporan	4.015.000

	1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. KUKAR	12	laporan	100.000.000	APBD		12	laporan	100.000.000
	1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. KUKAR	12	laporan	25.000.000	APBD		12	laporan	25.000.000
	1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	laporan	6.966.972.192	APBD		12	laporan	6.966.972.192
	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah		21,87%	unit	98.053.999	APBD		22%	unit	452.408.999
	1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kantor SATPOL PP	81	unit	-	APBD	Kenaikan Harga BBM, Sparepart dan Pajak	81	unit	354.355.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
	1.05.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kantor SATPOL PP	1 unit	20.000.000	APBD	Penyesuaian biaya sewa webhosting (sesuai pembayaran webhosting tahun 2022)	2	unit	20.000.000
	1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kantor SATPOL PP	2 unit	78.053.999	APBD	Dengan jumlah pagu awal yang tersedia (Rp. 78.054.000), masih dirasa belum mencukupi pmbiayaan. Oleh karena itu diperlukan tambahan anggaran Rp. 45.000.000 untuk biaya pengerjaan.	2	unit	78.053.999
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Kantor SATPOL PP	100 persen	590.000.000	APBD		100	persen	250.000.000
	1.05.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				250.000.000	APBD				250.000.000

	1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel					-					
	1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					250.000.000					
	1.05.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud					-					
	1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. KUKAR	99	unit	90.000.000	APBD	Pengadaan Peralatan KORSIK (1,600,000,000) + Peralatan Video Editing (100,000,000)	99	unit	90.000.000
						31.145.654.726					

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja 2025 disusun dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang akan digunakan dalam penyelenggaraan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Produk hukum daerah, serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana Kerja 2025 ini disusun sebagai pedoman bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu dari tahun 2021 - 2026.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah – kaidah dalam pelaksanaannya, yaitu :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
    1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.
    2. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026, namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sub kegiatan. Selanjutnya penyesuaian ini akan diakomodir pada saat dilakukannya penyusunan terhadap Renstra Tahun 2025-2029.
    3. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebagai komitmen untuk pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

1. Seluruh bidang dan seksi di dalam tubuh Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban untuk melaksanakan program– program Rencana Kerja Tahun 2025 ini dengan sebaik–baiknya.
2. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 tidak hanya memuat kegiatan – kegiatan dalam rangka pemenuhan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, tetapi juga memuat rancangan kerangka Pelayanan Publik yang membawa dampak penurunan angka pelanggaran trantibum di masyarakat.
3. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 menjadi dasar dalam penyusunan RKA dan DPA Tahun Anggaran 2025.

c. Rencana tindak lanjut

Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Renja Satuan Polisi Pamong Praja ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja untuk setiap triwulannya.
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja maka dokumen Rencana Kerja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
3. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja agar Renja 2025 ini dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur SATPOL PP.

4. Seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja perlu meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien.

Meskipun Rencana Kerja 2025 ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Rencana Kerja 2025 ini. Dengan demikian kesungguhan dalam menyusun Rencana Kerja 2025 ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja. Sehingga Visi visi dan misi RPJMD Kab.Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 "*Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia* " dapat tercapai.

kk.RENJA RSUD AM PARIKESIT

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, dokumen tersebut berisi perencanaan pembangunan daerah kabupaten sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional.

Rencana prioritas RSUD Aji Muhammad Parikesit yang tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 berisi tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, mengedepankan keterlibatan seluruh aspek pelayanan medis dan non medis serta manajemen.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Muhammad Parikesit merupakan rincian dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum didalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang akan direalisasikan dalam Renja tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Kerja RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah:

1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8 Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9 Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

13 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

15 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk mensinkronisasi antara pedoman kebijakan pembangunan tahun 2025 dalam kerangka pencapaian target-target RSUD Aji Muhammad Parikesit yang ada didalam Renstra Tahun 2021-2026.

b. Tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Aji Muhammad Parikesit tahun 2025 adalah :

1. Menjabarkan tujuan pembangunan kedalam program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2025;
2. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi peningkatan mutu pelayanan RSUD Aji Muhammad Parikesit.
3. Pedoman bagi pengelola (manajemen) RSUD Aji Muhammad Parikesit dalam melaksanakan seluruh kegiatan rumah sakit pada Tahun Anggaran 2025;
4. Sebagai acuan bagi unit-unit kegiatan di RSUD Aji Muhammad Parikesit dalam penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahun Anggaran 2025 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik;
5. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan bidang kesehatan dengan seluruh stakeholder;
6. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.

15.1. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksana Renja-PD Tahun lalu dan Capaian Renstra RSUD Aji Muhammad Parikesit
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Aji Muhammad Parikesit
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Aji Muhammad Parikesit
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Aji Muhammad Parikesit
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1. Program dan Kegiatan
BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra RSUD Aji Muhammad Parikesit

Evaluasi Pelaksana Renja ditentukan kepada hasil manfaat *input* dan *output* RSUD Aji Muhammad Parikesit tahun 2023. *Input* yang dimaksud disini dibatasi pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan *output*. Sementara itu *input* lain seperti SDM, bahan baku tidak dimasukan dalam evaluasi ini. Sedangkan yang dimaksud dengan *output* adalah hasil fisik dari suatu kegiatan.

Outcome atau indikator hasil tidak dianalisa pada evaluasi kinerja ini, mengingat diperlukannya periode penilaian yang lebih lama atau berkala untuk dapat melihat efektivitas kegiatan-kegiatan RSUD Aji Muhammad Parikesit dalam upaya mencapai tujuan, misi dan visi daerah.

Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal yaitu pencapaian (i) kinerja *output* dan (ii) kinerja keuangannya. Yang dimaksud dengan kinerja *output* adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

2.1.1. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Dana yang disediakan Rp 42.379.225.947
- Realisasi Keuangan Rp39.908.973.931 (94,17%)

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

- Dana yang disediakan Rp300.000.000
- Realisasi Keuangan Rp 0,00 (0%)

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Dana yang disediakan Rp24.872.238.969

- Realisasi Keuangan Rp23.908.221.852 (96,12%)

c. Peningkatan Pelayanan BLUD

1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

- Dana yang disediakan Rp598.838.565.601,00
- Realisasi Keuangan Rp393.287.422.827 (65,68%)

Program Pemenuhan UKP dan UKM

a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- Dana yang disediakan Rp144.896.594.692,00
- Realisasi Keuangan Rp136.751.180.385 (94,38%)

Tabel 2. 1. Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Aji Muhammad Parikesit dan Pencapaian Renstra SKPD S/D tahun 2024

RSUD Aji Muhammad Parikesit

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan	Indiator Kinerja Program (*outcomes*)/ kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian program (Renstra- PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.02	Kesehatan									
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kebupaten/Kota	Nilai SAKIP	A 80	A 80,32	BB 73	AA 96,10	131,64	BB 75	AA 96,10	128,13
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	5	1	1	1	100	1	1	100
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	341	349	349	349	100	349	349	100

1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5	1	1	1	100	1	1	100

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan	Indiator Kinerja Program (*outcomes*)/ kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian program (Renstra- PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD								
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	100	1	1	100
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1. Capaian Hasil Aspek Pelayanan Kinerja BLUD	67,00	65,17	55	65,17	118	65	65	97,26
						2. Angka Kematian Ibu	4	6	7	6	114,29	8	6	66,66
						3. Angka Kematian Bayi	68	74	80	76	105	76	76	100
						4. Skor penilaian Proper Lingkungan pada Kinerja BLUD	1	0,8	0,6	0,8	133	0,8	0,8	80

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan	Indiator Kinerja Program (*outcomes*)/ kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian program (Renstra- PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		5. Persentase Kompetensi SDM keperawatan yang memiliki sertifikat kegawatdaruratan	100	100	100	100	100	100	100	100
		6 Jumlah dokumen/laporan hasil supervisi keperawatan	5	1	1	1	100	1	3	60
		7. Jumlah dokumen/ laporan hasil pelaksanaan Model Asuhan Keperawatan Profesional (MAKP)	5	1	1	1	100	1	3	60
		8. Nilai Survei Kepuasan Pelanggan/ Masyarakat (SKM)	83,00	86,49	81,00	86,49	107	82,00	86,49	105,48
		9. Capaian Hasil Aspek Keuangan Kinerja BLUD	23,00	22,25	21,00	22,25	100	22,00	22,25	101,14
		10. Jumlah target pendapatan Rumah Sakit	1.534.550 .400.065	245.044. 865.001	239.165. 877.960	243.575. 266.365	101,84	303.121. 462.731		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan	Indiator Kinerja Program (*outcomes*)/ kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian program (Renstra- PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						11. Nilai Survei Kepuasan Karyawan RS	90,00	82,00	75,00	82,00	109	82,5	82,00	99,39
						12. Persentase Karyawan yang mendapat pelatihan 20 jam pertahun	50,00	94	25,00	94	376	35	94	268,57
						13. Persentase dokumen Laporan Kinerja yang terselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1	1	100	1	1	100
1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	*Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan RS*	90,50	88,06	88,5	88,06	100	89,5	88,06	98,39

1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	*Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan*	80	63,27	77,05	63,27	82	78	88,06	112,89

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan	Indiator Kinerja Program (*outcomes*)/ kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian program (Renstra- PD) tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)	
									Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Essensial*								
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5	1	546	546	100	46	0	0
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Hasil Penilaian Kinerja BLUD	89	-	-	-	-	-	-	-
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah kunjungan pasien	96.800	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Analsis Kinerja Pelayanan RSUD Aji Muhammad Parikesit

RSUD Aji Muhammad Parikesit telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran suatu Perangkat Daerah. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan penentuan posisi sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 2. 2. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai	Kriteria Penilaian	Kode
1.	91 >	Sangat Baik	Biru
2.	76 ≤ 90	Baik	Hijau
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh RSUD Aji Muhammad Parikesit dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 2. 3. Capaian Kinerja RSUD Aji Muhammad Parikesit Tahun 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2023		PERSENTASE
				TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Muhammad Parikesit	Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Muhammad Parikesit	Nilai / Skor	83,55	95,01	113,71%
		Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target	Persen	72	81,82	113,63%

Berdasarkan Renstra RSUD Aji Muhammad Parikesit Tahun 2021-2026, pada tahun 2023 rumah sakit memiliki 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran tersebut.

Berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang dilakukan, 1 (satu) indikator memenuhi kriteria penilaian kinerja (sangat baik ≥ 91%) Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis RSUD Aji Muhammad Parikesit beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

1. Peringkat Penilaian Akreditasi

   Berdasarkan evaluasi dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit kategori yang didapat adalah Kategori Paripurna dengan nilai 95,01%. Capaian ini adalah hasil dari akreditasi pada tahun 2023, sementara pada tahun 2020 hingga 2022 berdasarkan keputusan Kementerian Kesehatan tidak dilaksanakan akreditasi dikarenakan terhalang oleh pandemi COVID-19.

2. Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target.

   Berdasarkan capaian dengan persentase 81,82 terjadi peningkatan hasil, hal ini menunjukkan adanya perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit dalam memperbaiki Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

   Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

   a. Komitmen bersama terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang terstandar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementarian Kesehatan Republik Indonesia.
   b. Dukungan dari Pemerintah Daerah selaku pemilik Rumah Sakit dalam pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit
   c. Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementarian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan Elemen Penilaian Akreditasi Rumah Sakit. Penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal (SPM) Rumah Sakit dan Standar Akreditasi Rumah Sakit.
   d. Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin baik dalam peningkatan kualitas mutu dan menjaga mutu di Rumah Sakit.

e. Telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sehingga indikator sasaran bisa tercapai dan mendukung pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2. 4. Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan (SPM) RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
	Jam buka pelayanan gawat darurat	24 jam		24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	Tercapai
	Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat BLS/PPGD/GELS/ALS	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 Tim		1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	Tercapai
	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit		≤ 5 menit	≤ 5 menit	≤ 5 menit	≤ 5 menit	≤ 5 menit	1 menit	1 menit	≤ 5 menit	≤ 5 menit	Tercapai
	Kepuasan pelanggan pada Gawat Darurat	≥ 80 %		≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	82,79%	85,73%	≥ 80 %	≥ 80 %	Tercapai
	Kematian pasien kematian < 24 jam di Gawat Darurat	≤ 2 per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)		≤ 2 / 1000	≤ 2 / 1000	≤ 2 / 1000	≤ 2 / 1000	≤ 2 / 1000	5,79	1,75	≤ 2 / 1000	≤ 2 / 1000	Tercapai
	Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
2	Dokter pemberi pelayanan di klinik spesialis	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
	Ketersediaan pelayanan rawat jalan (Min Kes. Anak, Penyakit dalam, Kebidanan dan Bedah)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

	Jam Buka pelayanan sesuai ketentuan (08.00 – 14.00)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	94,98%	99,49%	100%	100%	Tidak tercapai

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit		≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	85 menit	70 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	Tidak tercapai
	Kepuasan pelanggan di rawat jalan	≥ 80 %		≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	89,10 %	90,40 %	≥ 80 %	≥ 80 %	tercapai
	Penegakan Diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60 %		≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	79,72 %	76,21 %	≥ 60 %	≥ 60 %	Tercapai
	Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan TB di RS	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
3	Pemberi pelayanan rawat inap	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Dokter penanggung jawab pasien (DPJP) rawat inap	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Ketersediaan pelayanan rawat inap (Minimal Anak, IPD, Bedah, Obgyn)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Jam visite dokter spesialis	100%		100%	100%	100%	100%	100%	81.68%	73.92%	100%	100%	Tidak tercapai
	Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1.5 %		≤ 1.5 %	≤ 1.5 %	≤ 1.5 %	≤ 1.5 %	≤ 1.5 %	0%	0%	≤ 1.5 %	≤ 1.5 %	Tercapai
	Angka kejadian infeksi nosokomial	≤ 1.5 %		≤ 1.5 %	≤ 1.5 %	≤ 1.5 %	≤ 1.5 %	≤ 1.5 %	1.44%	0.73%	≤ 1.5 %	≤ 1.5 %	Tercapai
	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/ kematian	100%		100%	100%	100%	100%	100%	99.99%	100%	100%	100%	Tercapai
	Kematian pasien > 48 jam	NDR ≤ 25 per mill		≤ 25 per mill	≤ 25 per mill	≤ 25 per mill	≤ 25 per mill	≤ 25 per mill	18.36‰	20.22‰	≤ 25 per mill	≤ 25 per mill	Tercapai
	Kejadian pulang paksa	≤ 5 %		≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	1.82%	1.47%	≤ 5 %	≤ 5 %	Tercapai
	Kepuasan pasien rawat inap	≥ 80 %		≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	88.48%	90.66%	≥ 80 %	≥ 80 %	tercapai
	Penegakan Diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60 %		≥60 %	≥60 %	≥60 %	≥60 %	≥60 %	58.47%	76.50%	≥60 %	≥60 %	Tercapai
	Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan TB di RS	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
4	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari		≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	1 hari	1 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	Tercapai
	Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1 %		≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	0%	0%	≤ 1 %	≤ 1 %	Tercapai

	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Komplikasi anestesi karena over- dosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan endotracheal tube	≤ 6 %		≤ 6 %	≤ 6 %	≤ 6 %	≤ 6 %	≤ 6 %	0%	0%	≤ 6 %	≤ 6 %	Tecapai
5	Angka kematian ibu	215 per 100.000 kelahiran hidup		-	-	-	-	-	212	235	215	215	Tidak Tercapai
	Angka kematian bayi	13 per 1000 kelahiran hidup		-	-	-	-	-	-	27	13	13	Tidak Tercapai
	Pemberi pelayanan persalinan normal (dr. Sp.OG, dr.Umum, bidan)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit (Tim PONEK)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi (Dokter Sp.OG, Sp.A, Sp.An)	100 %		100%	100%	100%	100%	100%	97,22%	94,78%	100%	100%	Tidak Tercapai
	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100%		100%	100%	100%	100%	100%	98%	99.04%	100%	100%	Tidak tercapai
	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20%		≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	50%	27.95%	≤ 20%	≤ 20%	Tidak tercapai
	Keluarga Berencana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Kepuasan pelanggan	≥ 80%		≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	89%	89.88%	≥ 80%	≥ 80%	Tercapai

6	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %		≤ 3 %	≤ 3 %	≤ 3 %	≤ 3 %	≤ 3 %	0.09%	0.0%	≤ 3 %	≤ 3 %	Tercapai

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Pemberi pelayanan unit intensif oleh dokter spesialis	100 %		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Pemberi pelayanan unit intensif oleh perawat terlatih	50 %		50%	50%	50%	50%	50%	43.14%	39.94%	50%	50%	Tidak Tercapai
7	Waktu tunggu hasil pelayanan thoraks foto	≤ 3 jam		≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	77 mnt	92 mnt	≤ 3 jam	≤ 3 jam	Tercapai
	Pelaksana ekspertise hasil pemeriksaan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	70.80%	100%	100%	Tidak tercapai
	Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	≤ 2 %		≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 2 %	0.62%	1.58%	≤ 2 %	≤ 2 %	Tercapai
	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %		≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	84.11%	83.56%	≥ 80 %	≥ 80 %	Tercapai
8	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 menit		≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit	97 mnt	88 mnt	≤ 140 menit	≤ 140 menit	Tercapai
	Pelaksana ekspertise hasil pemeriksaan laboratorium	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Kepuasan pelanggan	≥ 80%		≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	91.39%	86.85%	≥ 80%	≥ 80%	Tercapai
	Angka pengulangan pemeriksaan laboratorium	≤ 2 %		≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 2 %	-	0,55 %	≤ 2 %	≤ 2 %	Tercapai
9	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan	≤ 50%		≤ 50%	≤ 50%	≤ 50%	≤ 50%	≤ 50%	0%	0%	≤ 50%	≤ 50%	Tercapai
	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %		≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	87.29%	88.84%	≥ 80 %	≥ 80 %	Tercapai
10	Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤ 30 menit		≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	24	23	≤ 30	≤ 30	Tercapai
	Waktu tunggu pelayanan obat racikan	≤ 60 menit		≤ 60	≤ 60	≤ 60	≤ 60	≤ 60	34	37	≤ 60	≤ 60	Tercapai

	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %		≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	81%	82.15%	≥ 80 %	≥ 80 %	Tercapai

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Penulisan resep sesuai formularium	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99.95%	99.95%	100 %	100 %	Tercapai
11	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %		≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	96.69%	99.26%	≥ 90 %	≥ 90 %	Tercapai
	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %		≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	8.80%	11.82%	≤ 20 %	≤ 20 %	Tercapai
	Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	99.67%	100 %	100 %	Tidak Tercapai
12	Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	Tercapai
	Kejadian reaksi transfusi	≤ 0,01 %		≤ 0,01%	≤ 0,01%	≤ 0,01%	≤ 0,01 %	≤ 0,01 %	1.30%	0.42%	≤ 0,01 %	≤ 0,01 %	Tidak Tercapai
13	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	97.42%	95.98%	100%	100%	Tidak Tercapai
	Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	75%	93.13%	100 %	100 %	Tidak Tercapai
	Pengembalian rekam medik	≥ 80 %		-	-	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	-	75,58 %	≥ 80 %	≥ 80 %	Tidak Tercapai
	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit		≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	6 mnt	11 mnt	≤ 10 menit	≤ 10 menit	Tidak Tercapai
	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit		≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	7 mnt	7 mnt	≤ 15 menit	≤ 15 menit	Tercapai
14	Baku mutu limbah cair BOD< 30 mg/l	< 30 mg/l		< 30 mg/l	< 30 mg/l	< 30 mg/l	< 30 mg/l	< 30 mg/l	9.15	10.12	< 30 mg/l	< 30 mg/l	Tercapai
	Baku mutu limbah cair COD<80mg/l	< 80 mg/l		< 80 mg/l	< 80 mg/l	< 80 mg/l	< 80 mg/l	< 80 mg/l	21.39	21.73	< 80 mg/l	< 80 mg/l	Tercapai
	Baku mutu limbah cair TSS<30mg/l	< 30 mg/l		< 30 mg/l	< 30 mg/l	< 30 mg/l	< 30 mg/l	< 30 mg/l	16.31	11.66	< 30 mg/l	< 30 mg/l	Tercapai

	Baku mutu limbah cair PH 6-9	PH 6 – 9		PH 6–9	PH 6–9	PH 6–9	PH 6 – 9	PH 6 – 9	7.24	6.96	PH 6 – 9	PH 6 – 9	Tercapai
	Pengelolaan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	84.62%	96.84%	100 %	100 %	Tidak Tercapai

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
15	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	Tercapai
	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	Tercapai
	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	Tercapai
	Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	Tercapai
	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun	≥60%		≥60%	≥60%	≥60%	≥60%	≥60%	94.15%	38.28%	≥60%	≥60%	Tidak Tercapai
	Cost recovery	≥ 65%		≥ 65%	≥ 65%	≥ 65%	≥ 65%	≥ 65%	78,11%	66.45%	≥ 65%	≥ 65%	Tercapai
	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam		≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	100%	100%	≤ 2 jam	≤ 2 jam	Tercapai
	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	Tercapai
	Level IT terintegrasi	Siloed 2		-	-	Siloed 2	Siloed 2	Siloed 2	-	Siloed 2	Siloed 2	Siloed 2	Tercapai
	Kecepatan waktu tanggap komplain	≥ 80%		-	-	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	-	100%	≥ 80%	≥ 80%	Tercapai
16	Waktu pelayanan ambulance/ kereta jenazah	24 jam		24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	Tercapai
	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di RS	≤ 30 menit		≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	100%	100%	≤ 30 menit	≤ 30 menit	Tercapai
	Respon time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan (sesuai kebutuhan berlaku	≤ 30 menit		≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	5 mnt	5 mnt	≤ 30 menit	≤ 30 menit	Tercapai

17	Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah	≤ 2 jam		≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	6 menit	6 menit	≤ 2 jam	≤ 2 jam	Tercapai
18	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥ 80 %		≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	88%	88.11%	≥ 80 %	≥ 80 %	Tercapai

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100 % (Alkes)		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	Tercapai
		100 % (Non Alkes)		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	Tercapai
	Peralatan laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	Tercapai
19	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%		100%	100%	100%	100%	100%	99.74%	99.81%	100%	100%	Tidak Tercapai
	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang IRNA	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
20	Ada anggota Tim Pencegahan Penanggulangan Infeksi	75%		75%	75%	75%	75%	75%	97%	100%	75%	75%	Tercapai
	Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	60%		60%	60%	60%	60%	60%	100%	100%	60%	60%	Tercapai
	Angka kejadian dekubitus	≤ 1,5 $^{0}/_{00}$		-	-	≤ 1,5$^{0}/_{00}$	≤ 1,5 $^{0}/_{00}$	≤ 1,5 $^{0}/_{00}$	-	0,02 %	≤ 1,5 $^{0}/_{00}$	≤ 1,5 $^{0}/_{00}$	Tercapai
	Angka kejadian phlebitis	≤ 5 %		-	-	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	-	1,01 %	≤ 5 %	≤ 5 %	Tercapai
	Angka kejadian infeksi saluran kemih	≤ 4,7 $^{0}/_{00}$		-	-	≤ 4,7$^{0}/_{00}$	≤ 4,7 $^{0}/_{00}$	≤ 4,7 $^{0}/_{00}$	-	0,00 %	≤ 4,7 $^{0}/_{00}$	≤ 4,7 $^{0}/_{00}$	Tercapai
	Angka kejadian infeksi daerah operasi	≤ 2 %		-	-	≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 2 %	-	0,67 %	≤ 2 %	≤ 2 %	Tercapai
21	Keberhasilan hasil uji bowie dick pada mesin sterilisasi autoclave	100%		-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Peralatan medis memenuhi uji kelayakan setelah dilakukan dekontaminasi	≥ 90 %		-	-	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	-	≥ 99,99%	≥ 90 %	≥ 90 %	Tercapai

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Aji Muhammad Parikesit

Sebagai tahap awal penyusunan rencana kerja ini dilakukan analisis aspirasi *stakeholder* kunci rumah sakit. Stakeholder kunci adalah berbagai pihak utama yang berkepentingan atas pencapaian visi RSUD Aji Muhammad Parikesit. Analisis aspirasi ini didahului oleh kompilasi mengenai harapan dan kekhawatiran stakeholder kunci. Adapun yang termasuk dalam stakeholder kunci adalah Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dewan Pengawas), *Customer* (pasien), Peserta didik, Mitra (Ikatan Kerja Sama Pelayanan Kesehatan, Kerjasama Operasional, Supplier), SDM (karyawan).

Setelah dilakukan analisis aspirasi *stakeholder* kunci, rumah sakit menentukan isu strategis yang tengah terjadi, yang akan menentukan pencapaian visi serta realisasi misi rumah sakit. Dapat disimpulkan menjadi beberapa tema isu strategis yaitu:

a. Penguatan organisasi dan manajemen rumah sakit dalam rangka perbaikan tata kelola.
b. Kesiapan rumah sakit dalam transformasi budaya akreditasi
c. Presepsi seluruh pegawai terhadap perubahan budaya organisasi
d. Kompetensi dan keterampilan (*Soft Skill* dan *Hard Skill*) sumber daya manusia kesehatan dan manajemen
e. Tuntutan ekspansi dan diversifikasi pelayanan rumah sakit sesuai dengan dinamika lingkungan dan masyarakat.
f. Pengembangan jejaring dan kemitraan strategis
g. Ketergantungan terhadap pembiayaan dari pemerintah daerah
h. Persepsi *stakeholder* eksternal rumah sakit.
i. Kepercayaan pelanggan yang masih kurang

2.3.1. Kinerja RSUD Aji Muhammad Parikesit Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berpedoman pada visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara yang dijabarkan dalam Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, maka RSUD Aji Muhammad Parikesit melaksanakan Misi kedua yaitu Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul, dan Berbudaya. Pada misi ini tertuang Program Keluarga Peduli di mana peran RSUD Aji Muhammad Parikesit yaitu sebagai pengampu program yang bertugas dalam proses meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pelaksanaan misi kedua tersebut diamanatkan kepada RSUD Aji Muhammad Parikesit melalui perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Penyusunan perjanjian kinerja instansi juga mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan pengukuran capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran kinerja atas Perjanjian Kinerja RSUD Aji Muhammad Parikesit tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 5. Pengukuran Kinerja RSUD Aji Muhammad Parikesit Tahun 2023

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Muhammad Parikesit	Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Muhammad Parikesit (Nilai/Skor)	80	95,01	118,76 %
		Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target (Persen)	81	86,36	106,62 %
		Tingkat Maturitas BLUD (Level)	1,5	3,2	213,33 %
2.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah	Temuan Administasi BPK / Inspektorat yang di Tindak Lanjuti (Persen)	100	100	100 %
3.	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah (Persen)	100	100	100 %
4.	Melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa (Persen)	100	100	100 %
5.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN pertanggal 31 Maret 2023 (persen)	100	100	100 %
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKASN pertanggal 31 Maret 2023 (persen)	100	100	100 %
6.	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah (Predikat/Nilai)	B (60-70)	78,50	130,83 %
7.	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi E-Pantau (Persen)	100	100	100 %
8.	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penang-gulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi (Jumlah)	1	1	100 %

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
9.	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan (Persen)	100	100	100 %
10.	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik (Persen)	100	100	100 %
		Persentase Realisasi Keuangan (Persen)	100	72,82	72,82 %
11.	Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap Program Kegiatan di Perangkat Daerah	Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko maksimal 10 Januari (Laporan)	2	2	100 %
12.	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (Dokumen)	1	1	100 %
13.	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja (Kegiatan)	4	4	100 %
14.	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN (persen)	100	45,60	45,60 %
15.	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran (Persen)	100	100	100 %
16.	Pemenuhan Target Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan (Rupiah)	269.441.300.205	236.043.123.038	87,60 %

2.3.2. Permasalahan yang Dihadapi dalam Pencapaian Kinerja RSUD Aji Muhammad Parikesit

Berdasarkan capaian kinerja RSUD Aji Muhammad Parikesit Tahun 2023, bisa dilihat masih adanya permasalahan atau kendala yang dihadapi, diantaranya:

Tabel 2. 6. Permasalahan RSUD Aji Muhammad Parikesit

Permasalahan RSUD Aji Muhammad Parieksit	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
Kuantitas SDM yang terbatas	Belum adanya rekrutmen tenaga SDM/Tidak diizinkannya rekrutmen melalui anggaran APBD	Tersedianya regulasi rekrutmen tenaga non PNS melalui anggaran BLUD
Ketersediaan tenaga dokter spesialis dan sub spesialis belum sesuai standar	Kurangya dokter spesialis pada beberapa layanan	Pengajuan pendidikan dokter spesialis dan sub spesialis
Pelaksanaan pelatihan fungsional dan manajerial bagi tenaga rumah sakit masih sangat minim	Kurang dam terbatas penyelenggara diklat yang kompeten dan profesional	Adanya diklat melalui *Inhouse Training*
Beberapa bangunan dan prasarana belum memenuhi persyaratan teknis	Minim anggaran APBD	Adanya alokasi anggaran melalui BLUD
Belum terpenuhinya ketersediaan peralatan sesuai standar jenis dan jumlah	Minim anggaran	Adanya alokasi anggaran melalui BLUD
Pelaksanaan *clinical governance* yang belum optimal	Kurangnya Sosialisasi dan banyaknya Regulasi terbaru serta kurangnya Komitmen	Tuntutan pelayanan berkualitas

2.3.3. Isu Strategis Daerah terkait Tugas dan Fungsi RSUD Aji Muhammad Parikesit

Tugas dan fungsi RSUD Aji Muhammad Parikesit untuk mengurai isu strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021- 2026, diantaranya:

Tabel 2. 7.

Isu Strategis Daerah terkait Tugas dan Fungsi

RSUD Aji Muhammad Parikesit

No.	Isu Strategis Daerah	Peran RSUD Aji Muhammad Parikesit
a.	Implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh	Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi, Zona Integritas dan Pelayanan Publik di RSUD Aji Muhammad Parikesit
No.	Isu Strategis Daerah	Peran RSUD Aji Muhammad Parikesit
b.	Peningkatan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia	Pelayanan Kesehatan Paripurna dan berkualitas kepada Masyarakat

c.	Percepatan penanganan dan penanggulangan COVID-19 dan pemulihan dampaknya	Memberikan sosialisasi dan penanganan tindak lanjut bagi pasien Covid-19
d.	Pengembangan perekonomian berkelanjutan	-
e.	Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM, Sapras, Pelayanan Kesehatan dan Penunjang di Rumah Sakit
f.	Pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar untuk penguatan wilayah	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Gedung Rumah Sakit
g.	Transformasi dan percepatan pembangunan desa dan kecamatan	-
h.	Penataan Ruang dan Sumber Daya Air (Air Baku dan Irigasi)	-

Berdasarkan isu strategis Daerah, maka prioritas RSUD Aji Muhammad Parikesit pada Rencana Kerja Tahun 2025, adalah:

a. Meningkatkan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menjadi unit kerja Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
b. Mempertahankan predikat Pelayanan Prima paa Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
c. Mempertahankan predikat Paripurna akreditasi Rumah Sakit.
d. Pengembangan Rumah Sakit dengan membangun gedung dan fasilitas baru untuk meningkatkan kapasitas layanan kesehatan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Terdapat perubahan pagu anggaran dan penambahan sub kegiatan pada hasil analisis kebutuhan dibandingkan dengan rancangan awal RKPD. Perubahan tersebut meliputi adanya penambahan pagu pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Pengembangan Rumah Sakit dan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Sedangkan sub kegiatan yang bertambah adalah Pengadaan Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai dengan hasil pemetaan sub kegiatan.

Penjelasan proses penambahan pagu anggaran dan bertambahnya sub kegiatan antara lain :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pengalihan pagu yang semula berada di RSUD Aji Muhammad Parikesit dialihkan ke Dinas Kesehatan, dikarenakan Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pengguna Anggaran.

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Perubahan standar gaji berdasarkan Perbup No. 24 Tahun 2022 tentang Gaji Pegawai BLUD Non ASN RSUD. Adanya proyeksi penurunan pendapatan daerah pada saat penyusunan RPJMD, sehingga terjadi penurunan pada alokasi anggaran THL.

c. Pengembangan Rumah Sakit

- Renovasi Gedung Pelayanan diperlukan dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan spesialistik yang semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas serta memenuhi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Pengembangan ini juga diperlukan untuk memenuhi standar keselamatan pasien serta peningkatan kualitas pelayanan. Hal ini sebagaimana terdapat dalam amanat PP 47 tahun 2021 tentang Pelayanan Bidang Perumahsakitan.
- Betonisasi Jalan dalam kawasan RSUD Aji Muhammad Parikesit untuk memudahkan akses antar gedung pelayanan dengan gedung penunjang.

d. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, melaksanakan amanat:

1. Permenkes No 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit
2. Kepmenkes No 1128 Tahun 2022 ttg Standar Akreditasi Rumah Sakit, untuk memenuhi elemen penilaian dari Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
3. RSUD Aji Muhammad Parikesit merupakan penyangga dari RSUD AW Syahrani Samarinda
4. Kebutuhan Alat Kesehatan RSUD Aji Muhammad Parikesit untuk memenuhi pelayanan unggulan terutama KJSU sebagai rumah sakit rujukan regional Kalimantan Timur yaitu pelayanan kanker dan jantung.

Tabel 2. 8. Review Terhadap Rancangan AWAL RKPD Tahun 2025 kabupaten Kutai Kartanegara

RSUD Aji Muhammad Parikesit

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program dan Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					381.117.304.199	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				468.671.713.181	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	RSUD AM Parikesit	Nilai SAKIP RSUD Aji Muhammad Parikesit	77	376.117.304.199	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	RSUD AM Parikesit	Nilai SAKIP RSUD Aji Muhammad Parikesit	77	366.228.884.541	
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD AM Parikesit	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	1 Laporan	34.272.227.153	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD AM Parikesit	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	1 Laporan	325.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*RSUD AM Parikesit*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*349 Orang/ Bulan*	*33.972.227.153*	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*RSUD AM Parikesit*	*Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*0 Orang/ Bulan*	*0*	*Pengalihan pagu yang semula berada di RSUD Aji Muhammad Parikesit dialihkan ke Dinas Kesehatan, dikarenakan Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pengguna Anggaran*

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program dan Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*RSUD AM. Parikesit*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*1 laporan*	*300.000.000*	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semestera n SKPD*	*RSUD AM. Parikesit*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD*	*1 laporan*	*300.000.000*	*Sesuai*
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*RSUD AM. Parikesit*	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*0*	*0*	*Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*RSUD AM. Parikesit*	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*1*	*25.000.000*	*Infrastuktur berdasarkan KMK*
b	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	RSUD AM. Parikesit	Persentase Pemenuhan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.000.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	RSUD AM. Parikesit	Persentase Pemenuhan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	

	Daerah					Daerah					

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program dan Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*RSUD AM. Parikesit*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*10 Unit*	*1.000.000.000*	*Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*RSUD AM. Parikesit*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*0*	*0*	*Rasionalisasi Anggaran*
c.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	RSUD AM. Parikesit	Jumlah Dokumen Hasil Peman-faatan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	RSUD AM. Parikesit	Jumlah Dokumen Hasil Peman-faatan Barang Milik Daerah SKPD	1	10.000.000	
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	*RSUD AM. Parikesit*	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*	*0*	*0*	*Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*	*RSUD AM. Parikesit*	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*	*1*	*10.000.000*	*Infrastuktur berdasarkan KMK*
d.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	RSUD AM. Parikesit	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	0	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	RSUD AM. Parikesit	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	10.000.000	

	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	*RSUD AM. Parikesit*	*Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah*	*0*	*0*	*Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah*	*RSUD AM. Parikesit*	*Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah*	*1*	*10.000.000*	*Infrastuktur berdasarkan KMK*
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD AM. Parikesit	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerin-tah Daerah	100%	833.431.474	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD AM. Parikesit	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerin-tah Daerah	100%	24.872.238.969	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program dan Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*RSUD AM. Parikesit*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*1 Laporan*	*833.431.474*	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*RSUD AM. Parikesit*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*1 laporan*	*24.872.238.969*	*Adanya penyesuaian besaran gaji berdasarkan Perbup No. 24 Tahun 2022 tentang Gaji Pegawai BLUD Non ASN RSUD. Adanya proyeksi penurunan pendapatan daerah pada saat penyusunan RPJMD, sehingga terjadi penurunan pada alokasi anggaran THL.*
c	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD AM. Parikesit	1. Capaian Hasil Aspek Pelayanan Kinerja BLUD	67	341.011.645.572	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD AM. Parikesit	1. Capaian Hasil Aspek Pelayanan Kinerja BLUD	67	341.011.645.572	
			2. Angka Kematian Ibu	5				2. Angka Kematian Ibu	5		
			3. Angka Kematian Bayi	72				3. Angka Kematian Bayi	72		
			4. Skor penilaian Proper Lingkungan pada Kinerja BLUD	1				4. Skor penilaian Proper Lingkungan pada Kinerja BLUD	1		

			5. Persentase Kompetensi SDM keperawatan yang memiliki sertifikat kegawatdaruratan	100				5. Persentase Kompetensi SDM keperawatan yang memiliki sertifikat kegawatdaruratan	100		

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program dan Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			6 Jumlah dokumen/laporan hasil supervisi keperawatan	1				6 Jumlah dokumen/laporan hasil supervisi keperawatan	1		
			7. Jumlah dokumen/ laporan hasil pelaksanaan Model Asuhan Keperawatan Profesional (MAKP)	1				7. Jumlah dokumen/ laporan hasil pelaksanaan Model Asuhan Keperawatan Profesional (MAKP)	1		
			8. Nilai Survei Kepuasan Pelanggan/ Masyarakat (SKM)	82,50				8. Nilai Survei Kepuasan Pelanggan/ Masyarakat (SKM)	82,50		
			9. Capaian Hasil Aspek Keuangan Kinerja BLUD	22,50				9. Capaian Hasil Aspek Keuangan Kinerja BLUD	22,50		
			10. Jumlah target pendapatan Rumah Sakit	341.011. 645.572				10. Jumlah target pendapatan Rumah Sakit	341.011. 645.572		
			11. Nilai Survei Kepuasan Karyawan RS	85,00				11. Nilai Survei Kepuasan Karyawan RS	85,00		

			12. Persentase Karyawan yang mendapat pelatihan 20 jam pertahun	40,00				12. Persentase Karyawan yang mendapat pelatihan 20 jam pertahun	40,00		

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program dan Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			13. Persentase dokumen Laporan Kinerja yang terselesaikan	100				13. Persentase dokumen Laporan Kinerja yang terselesaikan	100		
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*RSUD AM. Parikesit*	*Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	*1 unit*	*341.011.645.572*	*Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*	*RSUD AM. Parikesit*	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	*1 unit*	*341.011.645.572*	*Sesuai*
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD AM. Parikesit	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan RS	90%	4.000.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD AM. Parikesit	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan RS	90%	102.442.828.640	
a.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	RSUD AM. Parikesit	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Essensial	79%	4.000.000.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah	RSUD AM. Parikesit	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Essensial	79%	102.442.828.640	

	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang	*RSUD AM. Parikesit*	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas*	*40 Unit*	*2.000.000.000*	*Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang*	*RSUD AM. Parikesit*	*Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas*	*128 Unit*	*54.242.828.640*	*Dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, melaksanakan amanat:*

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program dan Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		*Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*			*Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan*		*Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*			*- Permenkes No 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit - Kepmenkes No 1128 Tahun 2022 ttg Standar Akreditasi Rumah Sakit, untuk memenuhi elemen penilaian dari Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) - RSUD Aji Muhammad Parikesit merupakan penyangga pelayanan radioterapi dari RSUD AW Syahranie Samarinda.*

	Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit	*RSUD AM. Parikesit*	*Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi*	*1 Unit*	*2.000.000.000*	*Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit*	*RSUD AM. Parikesit*	*Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi*	*1 Unit*	*48.200.000.000*	*- Renovasi Gedung Pelayanan (Gedung Garuda dan Gedung Rajawali) diperlukan dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan spesialistik yang semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas.* *Pengembangan ini juga diperlukan untuk*

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program dan Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit					*rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit*			*memenuhi standar keselamatan pasien serta peningkatan kualitas pelayanan. Hal ini sebagaimana terdapat dalam amanat PP 47 tahun 2022 tentang perumahsakitan (40.000.000.000)* *- Betonisasi Jalan dalam Kawasan RSUD AM Parikesit Rp.8.200.000.000*

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2. 9. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RSUD Aji Muhammad Parikesit memiliki tugas pokok sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021 tentang Pelayanan Bidang Perumahsakitan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran RSUD Aji Muhammad Parikesit

3.2.1. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja RSUD Aji Muhammad Parikesit pada tahun 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi RSUD Aji Muhammad Parikesit adalah *"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit".*

3.2.2. Sasaran

Sasaran Rencana Kerja RSUD Aji Muhammad Parikesit pada tahun 2024 adalah *"Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit"* dengan indikator sebagai berikut :

1. Peringkat Penilaian Akreditasi;
2. Persentase Indikator SPM yang mencapai target.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja RSUD Aji Muhammad Parikesit 2025 mengacu pada program prioritas dalam Renstra RSUD Aji Muhammad Parikesit tahun 2021-2026.

4.1.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, diantaranya:

a. Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2022 pasal 3, RSUD Aji Muhammad Parikesit mempunyai tugas membantu Dinas Kesehatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam upaya kesehatan perorangan secara paripurna sesuai aturan perundang-undangan.
b. RSUD Aji Muhammad Parikesit merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Pendidikan.
c. RSUD Aji Muhammad Parikesit sebagai unit organisasi bersifat khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah serta bidang kepegawaian serta merupakan organisasi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
d. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra RSUD Aji Muhammad Parikesit Tahun 2021-2026.

4.1.2. Uraian Garis Besar Program dan Kegiatan

RSUD Aji Muhammad Parikesit pada tahun 2025 merencanakan 2 (dua) program, 6 (enam) kegiatan, dan 8 (delapan) sub kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pada program ini mencakup 5 (lima) kegiatan dan 6 sub kegiatan, sebagai berikut:

i. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan:

a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

b) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

ii. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

iii. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

iv. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

v. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Program ini mencakup 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

i. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit

b) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

4.1.3. Perumusan Kegiatan dan Anggaran yang tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD

Berikut beberapa kegiatan yang mengalami perubahan atau tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, diantaranya:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

   Pagu anggaran pada Sub Kegiatan ini di Renstra Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 833.431.474,00 mengalami perubahan atau kenaikan pagu indikatif dalam Renja Tahun 2025 sebesar Rp. 24.872.238.969. Perubahan ini didasarkan adanya penyesuaian besaran gaji yang sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 24 Tahun 2022 tentang Gaji Pegawai BLUD Non ASN RSUD.

2. Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit.

   Pada Renstra RSUD Aji Muhammad Parikesit Tahun 2025, anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp2.000.000.000 menjadi sebesar Rp48.200.000.000. Perubahan ini dikarenakan adanya Renovasi Gedung Pelayanan (Gedung Garuda dan Gedung Rajawali) yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan spesialistik yang semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Pengembangan ini juga diperlukan untuk memenuhi standar keselamatan pasien serta peningkatan kualitas pelayanan sebesar Rp40.000.000.000,00 serta Betonisasi Jalan dalam Kawasan RSUD AM Parikesit sebesar Rp8.200.000.000,00. Hal ini sebagaimana terdapat dalam amanat PP 47 tahun 2022 tentang perumahsakitan.

3. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

   Pada Renstra Tahun 2025, kegiatan ini memiliki pagu sebesar Rp2.000.000.000,00 menjadi pagu indikatif pada Renja Tahun 2025 sebesar Rp54.242.828.640. Perubahan ini juga dikarenakan untuk pemenuhan Alat Kesehatan yang diperlukan dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan spesialistik yang semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Pengembangan ini juga diperlukan untuk memenuhi standar keselamatan pasien serta peningkatan kualitas pelayanan. Hal ini sebagaimana terdapat dalam amanat PP 47 tahun 2022 tentang perumahsakitan.

Tabel 3. 1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Aji Muhammad Parikesit Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

RSUD Aji Muhammad Parikesit

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp.
1	02								468.671.713.181				413.855.340.238
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	RSUD AM. Parikesit	100%	366.228.884.541			100%	408.855.340.238
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	RSUD AM. Parikesit	*1 laporan*	325.000.000			*1 laporan*	325.000.000
1	02	01	2.02	0007	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD*	*RSUD AM. Parikesit*	*1 laporan*	*300.000.000*	*APBD*	*Sesuai*	*1 laporan*	*300.000.000*
1	02	01	2.02	0008	*Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*RSUD AM. Parikesit*	*1 Dokumen*	*25.000.000*	*APBD*	*Infrastuktur berdasarkan KMK*	*1 Dokumen*	*25.000.000*

1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	RSUD AM. Parikesit		10.000.000				10.000.000
1	02	01	2.03	0007	*Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*	*RSUD AM. Parikesit*	*1 Dokumen*	*10.000.000*	*APBD*	*Infrastuktur berdasarkan KMK*	*1 Dokumen*	*10.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp.
1	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD AM. Parikesit		10.000.000				10.000.000
1	02	01	2.04	0007	*Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah*	*Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah*	*RSUD AM. Parikesit*	*1 Laporan*	*10.000.000*	*APBD*	*Infrastuktur berdasarkan KMK*	*1 Laporan*	*10.000.000*
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*RSUD AM. Parikesit*	100%	24.872.238.969		Adanya penyesuaian besaran gaji berdasarkan Perbup No. 24 Tahun 2022 tentang Gaji Pegawai BLUD Non ASN RSUD	100%	24.872.238.969
1	02	01	2.08	0004	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*RSUD AM. Parikesit*	*1 Laporan*	*24.872.238.969*	*APBD*		*1 Laporan*	*24.872.238.969*
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1. Capaian Hasil Aspek Pelayanan Kinerja BLUD	*RSUD AM. Parikesit*	67	341.011.645.572		Dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, melaksanakan amanat: - Permenkes No 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit - Kepmenkes No 1128 Tahun 2022 ttg Standar Akreditasi Rumah Sakit, untuk memenuhi elemen penilaian dari Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)	67	383.638.101.269
						2. Angka Kematian Ibu		5				4	

						3. Angka Kematian Bayi		72				68	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp.
						4. Skor penilaian Proper Lingkungan pada Kinerja BLUD		0,8				1	
						5. Persentase Kompetensi SDM keperawatan yang memiliki sertifikat kegawatdaruratan		100				100	
						6 Jumlah dokumen/laporan hasil supervisi keperawatan		1				1	
						7. Jumlah dokumen/ laporan hasil pelaksanaan Model Asuhan Keperawatan Profesional (MAKP)		1				1	
						8. Nilai Survei Kepuasan Pelanggan/Masyarakat (SKM)		82,5				83	
						9. Capaian Hasil Aspek Keuangan Kinerja BLUD		22,5				23	
						10. Jumlah target pendapatan RS		341.011.645.572				383.638.101.269	
						11. Nilai Survei Kepuasan Karyawan RS		85				87,5	
						12. Persentase Karyawan yang mendapat pelatihan 20 jam pertahun		40				45	

						13. Persentase dokumen Laporan Kinerja yang terselesaikan		100				100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp.
1	02	01	2.10	0001	*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*		*RSUD AM. Parikesit*		*341.011.645.572*	*BLUD*	*Sesuai*	*1*	*383.638.101.269*
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan RS	RSUD AM. Parikesit	100%	102.442.828.640			100%	5.000.000.000
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Essensial	RSUD AM. Parikesit	89%	102.442.828.640			89%	5.000.000.000

1	02	02	2.01	0014	*Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit*	*Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000*	*RSUD AM. Parikesit*	*1*	*48.200.000.000*	APBD	*- Renovasi Gedung Pelayanan (Gedung Garuda dan Gedung Rajawali) diperlukan dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan spesialistik yang semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Pengembangan ini juga diperlukan untuk memenuhi standar keselamatan pasien serta peningkatan kualitas pelayanan. Hal ini sebagaimana terdapat dalam amanat PP 47 tahun 2022 tentang perumahsakitan (40.000.000.000)* *- Betonisasi Jalan dalam Kawasan RSUD AM Parikesit Rp.8.200.000.000*	*1*	*3.000.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp.
1	02	02	2.01	0022	*Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	*Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	*RSUD AM. Parikesit*	*128 Unit*	*54.242.828.640*	*APBD*	*Pemenuhan Alat Kesehatan diperlukan dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan spesialistik yang semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Pengembangan ini juga diperlukan untuk memenuhi standar keselamatan pasien serta peningkatan kualitas pelayanan. Hal ini sebagaimana terdapat dalam amanat PP 47 tahun 2022 tentang perumahsakitan.*	*128 Unit*	*2.000.000.000*

BAB V
PENUTUP

Berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah serta berdasarkan tugas dan fungsi RSUD Aji Muhammad Parikesit, terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya sebagai berikut:

1. Masih adanya beberapa indikator SPM yang belum tercapai.
2. Adanya proyeksi penurunan pendapatan daerah pada saat penyusunan RPJMD sehingga terjadi penurunan pada alokasi anggaran gaji THL atau non ASN berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Gaji Pegawai BLUD Non ASN RSUD.
3. Pengembangan Rumah Sakit dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan spesialistik yang semakin meningkat, baik secara kualitas maupun kuantitas serta memenuhi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Pengembangan ini juga diperlukan untuk memenuhi standar keselamatan pasien serta peningkatan kualitas pelayanan sebagaimana terdapat dalam amanat PP 47 tahun 2021 tentang Pelayanan Bidang Perumahsakitan.
4. Peningkatan serta perbaikan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan yang lebih baik sehingga mutu dan cakupan pelayanan kesehatan dapat lebih ditingkatkan secara lebih baik.

Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit merupakan dokumen rencana operasional yang merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025. Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Aji Muhammad Parikesit Tahun 2025. Diharapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang dalam Renja RSUD Aji Muhammad Parikesit Tahun 2025 ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan dan menjadi acuan bagi aparatur RSUD Aji Muhammad Parikesit dalam melaksanakan kegiatan sesuai

dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing sehingga kinerjanya menjadi lebih baik dan optimal.

Rencana tindak lanjut dalam penyusunan Renja RSUD Aji Muhammad Parikesit Tahun 2025 yaitu terdiri dari 2 (dua) program, 6 (enam) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan dengan Pagu Indikatif sebesar *Rp. 468.671.713.181,00 (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Enam Ratus*

Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah). Penyusunan Renja ini didasarkan pada hasil evaluasi kegiatan tahun berjalan yang berupa kendala, hambatan, dan keberhasilannya. Disisi lain, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik menjadi isu strategis Pemerintah Daerah.

ll.RENJA RSUD ABADI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran pelaksanaan kebijakan periode tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan hasil kinerja rumah sakit pada tahun 2023 dan prognosa kinerja tahun 2024, serta penerapan rencana pengembangan layanan berdasarkan *Review Masterplan* RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021.

Rencana pengembangan layanan berdasarkan *Review Masterplan* RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021 dalam hal peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang diarahkan pada pengembangan; (i) layanan unggulan yaitu layanan Hemodialisa, layanan *Trauma Center* Level III, layanan *Medical Check-Up*, layanan Pusat Jantung Terpadu, dan (ii) layanan *advance* yaitu (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) PONEK. Demikian pula rencana pengadaan peralatan kesehatan/kedokteran sesuai dengan standar Rumah Sakit yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan, dan anggaran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti (BLUD).

Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan melalui program dan kegiatan serta sub kegiatan, yang disusun secara komprehensif, terpadu, dan menyeluruh,

mengedepankan keterlibatan seluruh aspek pelayanan medis, non medis, dan manajemen.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 memiliki maksud yaitu:

a. Mengoptimalkan pencapaian target kinera Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti melalui perencanaan kinerja;
b. Sebagai dokumen perencanaan penganggaran untuk periode satu tahun;
c. Sebagai pedoman indikator kinerja kegiatan yang meliputi keluaran kegiatan, target keluaran kegiatan, lokasi kegiatan, dan pagu indikatif kegiatan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 memiliki tujuan yaitu:

a. Menindaklanjuti rencana kerja tahun-tahun sebelumnya yang belum difasilitasi dan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti;
b. Menyediakan pedoman pelaksanaan Program Kerja yang jelas dan terarah sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis dan

Anggaran (RBA) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025;

c. Menyediakan informasi sebagai media komunikasi para pemangku kepentingan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dengan Dewan Pengawas maupun dengan unit-unit pelayanan yang berfungsi sebagai alat kendali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi kinerja Program dan Kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU,

berisi tentang: Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review Terhadap Rancangan RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

berisi tentang:Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran PD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,

berisi tentang: Program dan Kegiatan.

BAB V PENUTUP

berisi tentang: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaannya, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) ditentukan kepada hasil manfaat *input* dan *output* RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti. *lnput* yang dimaksud di sini dibatasi pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan *output*, dan yang dimaksud dengan *output* adalah hasil fisik dari suatu kegiatan.

Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal; yaitu pencapaian (i) kinerja *output* dan (ii) kinerja keuangannya. Kinerja *output* adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah penghitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

Sasaran Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026, yaitu Meningkatnya Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti. Peningkatan tata kelola kinerja organisasi merupakan indikator kinerja utama RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yang dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik (*good corporate governance and good clinical governance*). Tolok ukur sasaran Meningkatnya Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu; (i) Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dan (ii) Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target. Hal ini terkait dengan tugas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam upaya kesehatan perorangan secara paripurna.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, serta sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti pada tahun 2023 melaksanakan 3 Program dan 6 Kegiatan serta 8 Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.213.677.953.898,- dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.191.847.469.186,- atau sebesar 89,78%. Analisis terhadap

evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program ini pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.111.577.069.507,- dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.92.148.843.027,- atau sebesar 82,60%. Anggaran tersebut terdiri dari dua sumber dana yaitu APBD dan BLUD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Struktur Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Uraian	Anggaran (Rp)	Realiasasi (Rp)	Penyerapan (%)
(1)	(2)	(3)	(4=3/4)
APBD	30.806.556.030	26.648.674.487	86,50
BLUD	80.770.513.477	65.500.168.540	81,09
Total	111.577.069.507	92.148.843.027	82,59

APBD tahun 2023 pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti penggunaannya terbatas pada pembiayaan gaji ASN, penatausahaan keuangan, dan penyediaan tenaga non ASN.

Berdasarkan tabel di atas, anggaran BLUD memiliki alokasi yang lebih besar, hal ini merupakan bentuk nyata komitmen RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dalam upaya mandiri secara keuangan, yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan rumah sakit meliputi perencanaan dan penganggaran, administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang, dan operasional rumah sakit, serta belanja modal/investasi sesuai kemampuan rumah sakit.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

   Program ini pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.100.210.780.391,- dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.97.884.575.573,- atau sebesar 97,68%. Program ini memfasilitasi beberapa kegiatan yaitu:

   a. Pengadaan Prasarana Rumah Sakit, meliputi:

1) Penyusunan Addendum Andal Rumah Sakit
Perencanaan pengembangan berdasarkan *Review Masterplan* Tahun 2021 akan melakukan perubahan lokasi bangunan dan penambahan bangunan fasilitas kesehatan dalam upaya meningkatkan pelayanan. Perencanaan tersebut belum dituangkan pada AMDAL terdahulu, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan. Untuk memperoleh Persetujuan Lingkungan yang baru, maka wajib menyusun Adendum Andal serta RKL-RPL.

2) Pengadaan Peralatan Penunjang Alat Kedokteran
Penggunaan alat kedokteran yang optimal diperlukan peralatan penunjangnya, guna menjamin mutu dan keselamatan pasien.

3) Penyusunan DED Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Jalan Pelaksanaan tahap 1 dari rencana pengembangan berdasarkan Review Masterplan Tahun 2021 adalah pembangunan gedung Instalasi Rawat Jalan.

4) Lanjutan Pembangunan Gedung Instalasi PONEK (Ruang IGD) Penyelesaian pelaksanaan pembangunan gedung Instalasi PONEK (Ruang IGD).

5) Pembangunan Instalasi Reverse Osmosis
Alat ini merupakan teknologi pemurnian air sehingga dapat memberikan penjaminan aman dalam penggunaan air bagi pasien.

6) Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Peningkatan kapasitas pengolahan limbah rumah sakit.

b. Pengadaan Alat Kesehatan, meliputi:
   1) Alat Kedokteran Umum;
   2) Alat Kedokteran Gigi;

3) Alat Kedokteran Bedah;
4) Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
5) Alat Kedokteran THT;
6) Alat Kedokteran Anak;
7) Alat Kedokteran Poliklinik;
8) Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis;
9) Alat Kedokteran *Neurologi;*
10) Alat Kedokteran *Radiodiagnostic*;
11) Alat Kedokteran *Patalogi Anatomy;*
12) Alat Kedokteran Gawat Darurat;
13) Alat Kedokteran ICU;
14) Alat Kedokteran Anestesi;dan
15) Alat Laboratorium Patologi.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program ini pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.1.890.104.000,-dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.1.814.050.586,- atau sebesar 95,98%. Capaian kinerja output dihitung berdasarkan jumlah karyawan rumah sakit yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan minimal selama 20 jam pelajaran yaitu sebanyak 367 orang, yang pada tahun 2023 ditetapkan targetnya sebanyak 300 orang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dalam rangka peningkatan kompetensi dilaksanakan dengan baik dan melebihi target yang telah ditetapkan. Ini adalah salah satu bentuk nyata RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Pelaksanaan anggaran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2023 dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

Kode	Uraian	Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Target	Capaian	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,50 Sangat Baik / BB	77,00 Sangat Baik / BB	106,21	111.577.069.507	92.148.843.027	82,60
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	2 Laporan	2 Laporan	100	16.128.238.950	14.693.489.957	91,16
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1652 Orang	1625 Orang	98,37	15.585.838.950	14.198.427.834	91,15
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	100	524.280.000	495.062.123	91,27
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100	14.655.910.656	11.955.184.530	81,45
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100	14.655.910.656	11.955.184.530	81,45
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	75 Nilai	80,65 Nilai	107,53	80.770.513.477	65.500.168.540	81,09

1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	100	80.770.513.477	65.500.168.540	81,09

Kode	Uraian	Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Target	Capaian	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	81,50 Persen	47,62 Persen	58,43	100.210.780.391	97.884.575.573	97,68
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar	4 Kategori	4 Kategori	100	99.954.218.391	97.704.300.436	97,75
1.02.02.2.01.0013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	215 Unit	215 Unit	100	26.804.683.630	25.635.654.584	95,64
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	206 Unit	206 Unit	100	73.149.534.761	72.068.645.852	98,52
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 Persen	100 Persen	100	256.562.000	180.275.137	70,27
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	100	256.562.000	180.275.137	70,27

Kode	Uraian	Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Target	Capaian	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100 Persen	100 Persen	100	1.890.104.000	1.814.050.586	95,98
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya	55 Persen	85,30 Persen	155,09	1.890.104.000	1.814.050.586	95,98
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	300 Orang	367 Orang	122,33	1.890.104.000	1.814.050.586	95,98
						213.677.953.898	191.847.469.186	89,78

Tabel 3. T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja tahun (2023)	Realisasi Renja tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 / Sangat Baik (BB)	72,84 / Sangat Baik (BB)	72,50 / Sangat Baik (BB)	77,00 / Sangat Baik (BB)	106,21	73 / Sangat Baik (BB)	73 / Sangat Baik (BB)	100
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	100

1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/ Bulan	93 Orang/ Bulan	118 Orang/ Bulan	93 Orang/ Bulan	104,49	118 Orang/ Bulan	118 Orang/ Bulan	100
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja tahun (2023)	Realisasi Renja tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	75	79,35	75	80,65	107,53	75	75	100
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	83 Persen	40 Persen	81,50 Persen	47,62 Persen	58,43	82 Persen	82 Persen	100

	MASYARAKAT									
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar	4 Kategori	4 Kategori	4 Kategori	4 Kategori	100	4 Kategori	4 Kategori	100
1.02.02.2.01.0013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	-	215 Unit	215 Unit	100	-	-	-
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	-	206 Unit	206 Unit	100	10 Unit	10 Unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja tahun (2023)	Realisasi Renja tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM Agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 dan/atau Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rumah Sakit	-	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100

1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja tahun (2023)	Realisasi Renja tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDMK yang Kompeten	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK yang Ditingkatkan Kompetensinya	65 Persen	50 Persen	55 Persen	85,30 Persen	155,09	60 Persen	60 Persen	100
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	200 Orang	200 Orang	300 Orang	367 Orang	122,33	300 Orang	300 Orang	100

Pada Tabel T-C.29 jika dicermati terdapat beberapa kolom yang kosong, hal ini menunjukan bahwa kegiatan tersebut tidak ada dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026 atau tidak dilaksanakan pada tahun berkenaan, karena kebijakan pada masa tersebut, untuk melaksanakan penyusunan anggaran yang efektif dan efisien, namun tetap menunjang pencapaian kinerja.

Pada Tabel T-C.29 juga bisa dilihat pada kolom 4, terdapat beberapa sub kegiatan baru, yang sebelumnya tidak ada pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026. Hal ini terjadi karena kondisi tertentu, dapat kami jelaskan seperti berikut:

1. 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

   Sub Kegiatan ini dimunculkan untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Tahun 2024 yaitu Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran.

2. 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit

   Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyebabkan Sub Kegiatan 1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Layanan Kesehatan dihapus. Oleh karena itu, Sub Kegiatan ini dimunculkan untuk mengakomodir pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Sesuai dengan tugas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yaitu membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam upaya kesehatan perorangan secara paripurna, kinerja pelayanan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga merupakan Indikator dari Sasaran Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026, yaitu Meningkatnya Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, yang diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu sebagai berikut:

1. Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Indikator ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Kesehatan

   Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit yang mewajibkan setiap rumah sakit memenuhi standar akreditasi. Standar akreditasi adalah pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

   Berdasarkan Survey Akreditasi Rumah Sakit pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2023 dan 13 Oktober 2023 oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP), RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti memperoleh Tingkat Kelulusan Paripurna, yang tercantum pada Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor 00416/U/X/2023 yang berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan 25 Oktober 2027.

KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

SERTIFIKAT AKREDITASI RUMAH SAKIT
Nomor : 00416/U/X/2023

Diberikan Kepada
RS Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti
Alamat :
Jl Balikpapan - Handil II, RT 01 Kelurahan Sengkal Seluang , Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur 75271

Tingkat Kelulusan
Paripurna
Berlaku Sampai : 25 Oktober 2027
Jakarta, 30 Oktober 2023

Mengetahui,

Gambar 1. Sertifikat Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

2. Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit pada hakekatnya merupakan jenis-jenis pelayanan rumah sakit yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit dengan standar kinerja yang ditetapkan. Indikator SPM adalah tolok ukur untuk prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. Pemenuhan indikator SPM menunjang pencapaian standar mutu dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Tabel 4. Capaian SPM Rumah Sakit Tahun 2023

Jenis Pelayanan	Jumlah Indikator Standar	Jumlah Indikator yang Tercapai	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4=3/2*100)
Gawat Darurat	8	7	87,50
Rawat Jalan	7	6	85,71
Rawat Inap	12	12	100,00
Kamar Operasi	7	7	100,00
Persalinan, perinatologi, dan KB	9	7	77,78
Rawat Intensif	3	3	100,00
Radiologi	4	2	50,00
Laboratorium Patologi Klinik	5	5	100,00
Rehabilitasi Medik	3	3	100,00
Farmasi	5	3	60,00
Gizi	3	3	100,00
Transfusi Darah	2	1	50,00
Rekam Medis	5	2	40,00
Pengelolaan Limbah	7	7	100,00
Administrasi dan Manajemen	11	8	72,73
Ambulance/Kereta Jenazah	3	3	100,00
Pemulasaran Jenazah	1	1	100,00
Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	4	0	0,00
Laundry	2	1	50,00
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	7	7	100,00
CSSD	2	1	50,00
Jumlah	110	89	80,91

Pada tabel capaian SPM, dari 21 jenis pelayanan, 10 pelayanan telah berhasil memenuhi SPM 100%. Pelayanan yang belum berhasil memenuhi SPM 100% menjadi fokus untuk perbaikan, yang menjadi bahan evaluasi bagi manajemen rumah sakit dan Komite Mutu serta Kepala Instalasi/Unit terkait, untuk merumuskan strategi perbaikan, dan menetapkan kebijakan peningkatan layanan yang dituangkan dalam Program Kerja Unit.

Berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023 yang juga merupakan Indikator dari Sasaran Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026, dapat disimpulkan bahwa RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti berkomitmen dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terstandar, dibuktikan melalui Status Akreditasi Rumah Sakit dan Hasil Capaian SPM Rumah Sakit.

Tabel 5. Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti													
1	Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti			80,50 (Paripurna)	80,50 (Paripurna)	80,50 (Paripurna)	80,50 (Paripurna)	80,50 (Paripurna)	80,50 (Paripurna)	92,18 (Paripurna)	92,18 (Paripurna)	92,18 (Paripurna)	Tercapai
2	Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target			75,00	75,50	76,00	76,50	77,00	81,63	80,91	76,00	76,50	Tercapai

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang memberikan layanan kesehatan secara profesional di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang memiliki peran dalam pencapaian visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara yang dijabarkan dalam Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

2.3.1 Kinerja OPD Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berpedoman pada visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara yang dijabarkan dalam Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, maka RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti melaksanakan Misi kedua yaitu Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul, dan Berbudaya. Pada misi ini tertuang Program Keluarga Peduli di mana peran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yaitu sebagai pengampu program yang bertugas dalam proses meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pelaksanaan misi kedua tersebut diamanatkan kepada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti melalui perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Penyusunan perjanjian kinerja instansi juga mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan pengukuran capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran kinerja atas Perjanjian Kinerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Nilai	80,50 (Paripurna)	92,18 (Paripurna)	114,51	Sangat Tinggi
		Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target	Persen	75,50	80,91	107,17	Sangat Tinggi
2	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat	Temuan Administrasi BPK/ Inspektorat yang di Tindak Lanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
3	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Menjadi Kewenangannya Secara Efisien, Efektif, Terbuka, dan Bersaing, Transparan, Adil Tidak Diskriminatif dan Akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
5	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
6	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	70 Baik (B)	73,00 Sangat Baik (BB)	104,29	Sangat Tinggi
7	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	Membuat Inovasi dan/atau Diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100,00	Sangat Tinggi
9	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
10	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Realisasi Keuangan	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
11	Melaksanakan Manajemen Resiko Terhadap Program dan Kegiatan di Perangkat Daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko Maksimal 10 Januari	Laporan	2,00	2,00	100,00	Sangat Tinggi

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	Melaksanakan Reviu Awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Sesuai Dengan Data Terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	1,00	100,00	Sangat Tinggi
13	Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja	Kegiatan	4,00	4,00	100,00	Sangat Tinggi
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP Per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
15	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
16	Pemenuhan Target Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan	Rupiah	46.200.000.000	42.317.076.975	91,60	Sangat Tinggi
					Rata-rata	100,92	Sangat Tinggi

2.3.2 Permasalahan yang Dihadapi Dalam Pencapaian Kinerja OPD

Pada Perjanjian Kinerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2023 bisa dilihat bahwa Rumah Sakit selain tugas dan fungsi sebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat secara komprehensif, juga diharapkan dapat berkinerja baik dari segi tata kelola klinis maupun tata kelola non klinis, dengan kompleksitas permasalahan yang ada karena Rumah Sakit adalah layanan yang padat dengan sumber daya manusia, padat tindakan/intervensi baik medis maupun tindakan keperawatan, padat sarana penunjang, padat administratif, dan padat akan kebutuhan yang harus dipenuhi baik secara internal maupun eksternal.

Banyaknya permasalahan yang dihadapi maka untuk mengatasi hal- hal tersebut, dilakukanlah identifikasi semua permasalahan baik yang bersifat mayor maupun minor. Pencermatan (*scanning*) kondisi lingkungan internal organisasi berupa, kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*), serta kondisi lingkungan eksternal organisasi yaitu, peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*). Kemudian dilakukan analisa SWOT (*strength*, *weakness*, *oppprtunity*, dan *threat*) untuk mengetahui gambaran bisnis dan posisi strategis organisasi.

Tabel 7. Penentuan Bobot Pada Analisa SWOT

No.	Bobot	Keterangan
1	0,20	Sangat Kuat
2	0,15	Di Atas Rata-rata
3	0,10	Rata-rata
4	0,05	Di Bawah Rata-rata

Tabel 8. Penentuan Rating Pada Analisa SWOT

No.	*Rating*	Keterangan
1	4	*Major Strenght*
2	3	*Minor Strenght*
3	2	*Minor Weakness*

4	1	*Major Weakness*

Tabel 9. Faktor Internal – Kekuatan (*Strenght*)

No.	Faktor	Bobot	*Rating*	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3x4)
STRENGTHS				
1	Kelengkapan jenis pelayanan yang tersedia sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C	0,10	3	0,30
2	Ketersediaan SDM dokter	0,20	4	0,80
3	Ketersediaan peralatan medik	0,20	4	0,80
4	Memiliki *captive market* BPJS	0,15	3	0,45
5	Status rumah sakit sebagai PPK BLUD	0,10	3	0,30
6	Ketersediaan lahan milik pemerintah dengan luasan yang memadai untuk pengembangan ke depan	0,10	3	0,30
7	Lokasi rumah sakit strategis berada di tepi jalan raya dan merupakan perlintasan antar kota	0,05	3	0,15
8	Petunjuk informasi di rumah sakit	0,05	3	0,15
9	Kinerja pelayanan rumah sakit meningkat tiap tahunnya	0,05	3	0,15
	Skor *Strenght*	1,00		3,40

Tabel 10. Faktor Internal – Kelemahan (*Weaknesses*)

No.	Faktor	Bobot	*Rating*	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3x4)
WEAKNESSES				
1	Zonasi dan sirkulasi rumah sakit	0,10	-3	-0,30
2	Ketersediaan SDM organik	0,15	-4	-0,60
3	SIM & IT rumah sakit belum optimal mendukung integrasi pelayanan	0,10	-4	-0,40
4	*Maintenance* fasilitas dan alat kesehatan belum optimal	0,10	-4	-0,40

5	Penggunaan media sosial sebagai sarana informasi dan promosi rumah sakit belum optimal	0,05	-3	-0,15
6	Penataan parkir	0,05	-3	-0,15
7	Ketersediaan fasilitas umum di rumah sakit	0,05	-3	-0,15
8	Belum tersedia produk unggulan rumah sakit	0,05	-3	-0,15
9	Kemudahan akses dan ketersediaan transportasi umum menuju rumah sakit	0,05	-3	-0,15
10	Komunikasi dan koordinasi internal rumah sakit kurang lancar	0,15	-4	-0,60
11	Pengaturan sistem antrian pasien belum semuanya secara digital	0,05	-3	-0,15
12	Penggunaan teknologi peralatan medik belum optimal	0,10	-4	-0,40
	Skor *Weakness*	1,00		-3,65

Tabel 11. Faktor Eksternal – Peluang (*Opportunities*)

No.	Faktor	Bobot	*Rating*	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3x4)
OPPORTUNITIES				
1	Dukungan Pemerintah Daerah untuk pengembangan	0,15	4	0,60
2	Pasar yang tersedia masih terbuka lebar	0,10	4	0,40
3	Jaringan komunikasi yang cepat dalam era digital 4.0 yang berkembang secara global	0,10	3	0,30
4	Belum adanya rumah sakit sekitar yang memiliki peralatan canggih yang komplit	0,10	4	0,40
5	Transisi demografi dan epidemologi penyakit mendukung pelayanan rumah sakit sebagai rujukan	0,10	3	0,30
6	Pengembangan potensi wisata di Samboja	0,05	3	0,15

7	Rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur	0,05	3	0,15
8	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana melalui kerjasama pihak ketiga	0,10	3	0,30
9	Kesadaran masyarakat atas kesehatan dan pelayanan rumah sakit tinggi	0,15	4	0,60
10	Kemitraan dengan perusahaan dan sarana kesehatan lain dalam membina jejaring guna pengembangan pelayanan yang spesifik/ rujukan	0,10	4	0,40
	Skor *Opportunities*	1,00		3,60

Tabel 12. Faktor Eksternal – Tantangan (*Threats*)

No.	Faktor	Bobot	*Rating*	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3x4)
THREATS				
1	Perubahan kebijakan *stakeholder* dan kompleksitas regulasi	0,20	-4	-0,80
2	Regulasi tarif rumah sakit pemerintah yang mengikat dan ada batasan terutama pasien BPJS, kurang kompetitif	0,10	-3	-0,30
3	Perkembangan *advanced technology* dan *medical equipment* diikuti biaya tinggi	0,15	-3	-0,45
4	Penggunaan media sosial untuk mengkritisi layanan rumah sakit mempengaruhi *brand image*	0,10	-3	-0,30
5	Pengembangan teknologi kedokteran yang pesat sehingga perlu pembaharuan pada beberapa peralatan medik	0,15	-3	-0,45
6	Rumah sakit kompetitor swasta yang menjalin kemitraan dengan unggulan dan pasar yang sama, lebih inovatif	0,05	-3	-0,15

7	Globalisasi era MEA/ ACTA sebagai sarana perpindahan SDM muncul rumah sakit pesaing yang memberikan kesejahteraan lebih	0,10	-3	-0,30
8	Berkembangnya medikolegal dalam penyelesaian masalah hukum di rumah sakit	0,15	-4	-0,60
	Skor *Threats*	1,00		-3,35

Skor Faktor Internal dan Faktor Eksternal Analisa SWOT

1	Skor Faktor Internal (x)	
	Strengths + *Weaknesses*	3,40 + (-3.65) = -0,25
2	Skor Faktor Eksternal (y)	
	Opportunities + *Threats*	3,60 + (-3,35) = 0,25

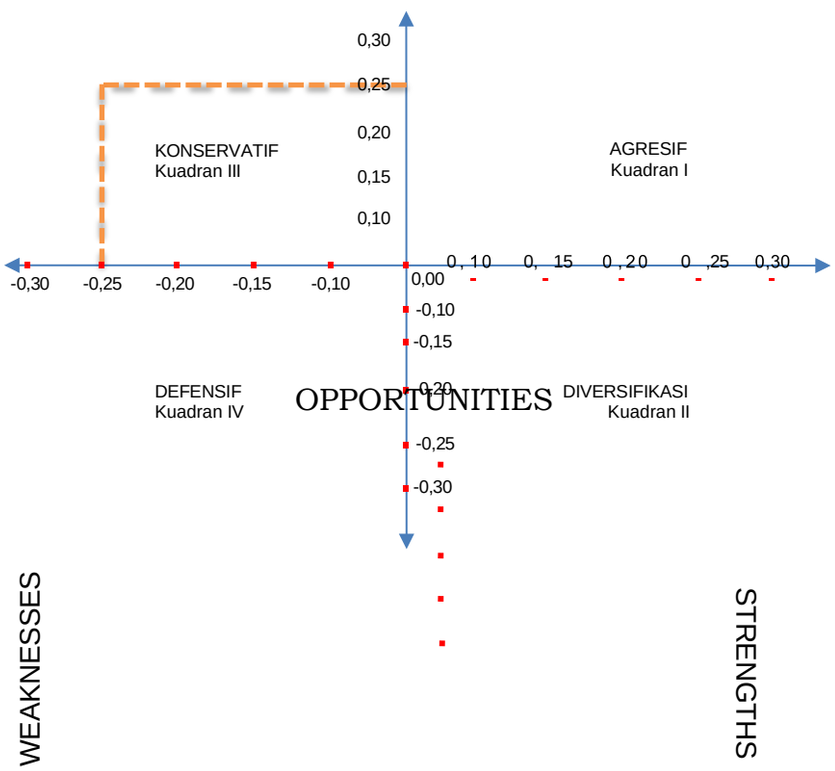

Gambar 2. Diagram Analisis SWOT

Hasil Analisis SWOT menunjukkan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti berada di Kuadran III. Dalam hal ini, skor nilai kelemahan masih lebih besar dibandingkan dengan skor nilai kekuatan. Organisasi rumah sakit mengalami kelemahan internal sehingga sulit untuk meraih peluang yang menguntungkan.

Strategi yang tepat untuk kondisi ini adalah Konsolidasi, melakukan perbaikan dan mengubah cara pandang terhadap beberapa hal yang dapat digali dari hasil survey kepuasan pelanggan. Pada dasarnya masalah yang ada perlu diselesaikan agar rumah sakit secara internal kuat dan solid, mampu menghadapi tantangan/ancaman dari luar.

2.3.3 Isu Strategis Daerah Terkait Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan isu strategis Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti terkait tugas dan fungsinya memiliki peran sebagai berikut:

Tabel 13. Peran OPD Terhadap Isu Strategis Daerah

No.	Isu Strategis Daerah	Peran OPD
(1)	(2)	(3)
1	Implementasi Reformasi Birokrasi Secara Menyeluruh	-
2	Peningkatan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia	Memberikan Layanan Kesehatan Tingkat Lanjut Secara Paripurna
3	Pemulihan Dampak COVID-19 dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Memberikan Layanan Kesehatan Tingkat Lanjut Bagi Pasien COVID- 19 dan Pasien Gizi Buruk Serta Stunting
4	Pengembangan Perekonomian Berkelanjutan	-
5	Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)	Meningkatkan Kapasitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Agar Mampu Memberikan Layanan Kesehatan Tingkat Lanjut di Kawasan Pembangunan IKN
6	Pemerataan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Untuk Penguatan Wilayah	-
7	Transformasi dan Percepatan Pembangunan Desa dan Kecamatan	-
8	Penataan Ruang dan Sumber Daya Air (Air Baku dan Irigasi)	-

Berdasarkan peran OPD dalam isu strategis Daerah, maka prioritas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, yaitu:

1. Pengembangan Jenis Layanan Tingkat Lanjut Rawat Jalan Dalam Rangka Menjadi Rumah Sakit Tipe B

Hal ini diperlukan guna menambah layanan klinik spesialis guna meningkatkan layanan kesehatan dan keselamatan pasien.

2. Peningkatan Kapasitas Rawat Inap Dalam Rangka Menjadi Rumah Sakit Tipe B

Hal ini diperlukan guna menambah kapasitas ruang rawat inap dalam mengakomodir tempat tidur pasien, yang saat ini berjumlah 104, akan ditingkatkan menjadi 200.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025. Perumusan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

1. Kemampuan keuangan BLUD RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yang dipandang sudah mampu membiayai kegiatan operasional Rumah Sakit.
2. Instruksi Dewan Pengawas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti terkait penggunaan APBD hanya untuk gaji pegawai dan belanja investasi. Hal ini menyebabkan beberapa sub kegiatan yang bersifat operasional yang pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, semula dianggarkan pada APBD, anggarannya menjadi Rp. 0 karena pelaksanaannya dialihkan ke BLUD.
3. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, berdasarkan analisa bagian keuangan rumah sakit, jumlah anggaran pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 tidak mencukupi untuk mengakomodir PNS 93 orang, PPPK 25 orang, dan Calon PPPK 105 orang pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, sehingga perlu menambah anggaran.
4. Pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026, belum terakomodir anggaran untuk peningkatan

infrastruktur dalam rangka menjadi salah satu Fasilitas Kesehatan penyangga Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, sehingga akan memunculkan sub kegiatan baru, yaitu:

a. Pengembangan Rumah Sakit
b. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

5. Pada Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, yang mengakomodir peningkatan kompetensi pegawai sebanyak 100 Orang, setelah dilakukan analisa terhadap indikator kinerjanya oleh Komite Mutu RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, dinyatakan kurang untuk memenuhi indikator SPM terkait peningkatan kompetensi pegawai yaitu 60% dari jumlah total pegawai di Rumah Sakit.

Tabel 14. Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	RSUD ABADI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,50 Sangat Baik / BB	83.559.734.117	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	RSUD ABADI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,50 Sangat Baik / BB	77.500.265.656	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	297.295.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	277.835.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	Lihat Tabel 15
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	19.460.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	Lihat Tabel 15

B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	2 Laporan	16.427.888.461	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	2 Laporan	381.215.000	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD ABADI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	118 Orang/ Bulan	15.758.648.461	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD ABADI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	Lihat Tabel 15
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	313.025.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	Lihat Tabel 15

						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	356.215.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	356.215.000	Lihat Tabel 15
6	-	-	-	-	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	25.000.000	Lihat Tabel 15
C						Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Laporan	20.000.000	
7	-	-	-	-	-	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	10.000.000	Lihat Tabel 15
8	-	-	-	-	-	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	10.000.000	Lihat Tabel 15

D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Layanan	1.243.140.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Layanan	1.243.140.000	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.243.140.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.243.140.000	Lihat Tabel 15

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	14.655.910.656	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	14.655.910.656	
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.655.910.656	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.655.910.656	Lihat Tabel 15
F	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD ABADI	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	75 Nilai	50.935.500.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD ABADI	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	75 Nilai	61.200.000.000	
11	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD ABADI	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	50.935.500.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD ABADI	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	61.200.000.000	Lihat Tabel 15
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD ABADI	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	82 Persen	1.016.260.080	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD ABADI	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	82 Persen	108.805.244.989	
G	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	RSUD ABADI	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja	4 Kategori	602.898.080	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	RSUD ABADI	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja	4 Kategori	108.805.244.989	

	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Kesehatan yang Memenuhi Standar			Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Kesehatan yang Memenuhi Standar			
12	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	RSUD ABADI	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	12 Unit	602.898.080	-	-	-	-	-	Lihat Tabel 15

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	-	-	-	-	-	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD ABADI	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	12.805.244.989	Lihat Tabel 15
14	-	-	-	-	-	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD ABADI	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	96.000.000.000	Lihat Tabel 15
H	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Persentase Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 Persen	413.362.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Persentase Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang Menerapkan Standar Pelayanan	-	-	

15	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	413.362.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	-	-	Lihat Tabel 15

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD ABADI	Persentase SDMK yang Kompeten	100 Persen	801.180.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD ABADI	Persentase SDMK yang Kompeten	100 Persen	1.500.000.000	
i	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Persentase SDMK yang Ditingkatkan Kompetensinya	60 Persen	801.180.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Persentase SDMK yang Ditingkatkan Kompetensinya	65 Persen	1.500.000.000	
16	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	801.180.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	300 Orang	1.500.000.000	Lihat Tabel 15
				Total	85.377.174.197				Total	187.805.510.645	

Tabel 15. Catatan Penting Hasil Analisis Kebutuhan

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	77.500.265.656	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Sub Kegiatan ini semula memiliki anggaran sebesar Rp. 277.835.000 kemudian dilakukan evaluasi sehingga saat ini pagu anggarannya menjadi Rp. 0 karena berdasarkan analisa kemampuan keuangan rumah sakit, anggaran sub kegiatan yang bersifat operasional diakomodir melalui BLUD sebagai komitmen mandiri secara keuangan dan membantu mengurangi beban APBD, jadi anggaran pada sub kegiatan ini dialihkan ke sub kegiatan bersifat investasi. Hal ini sejalan dengan instruksi dari Ketua Dewan Pengawas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Sub Kegiatan ini semula memiliki anggaran sebesar Rp. 19.460.000 kemudian dilakukan evaluasi sehingga saat ini pagu anggarannya menjadi Rp. 0 karena berdasarkan analisa kemampuan keuangan rumah sakit, anggaran sub kegiatan yang bersifat operasional diakomodir melalui BLUD sebagai komitmen mandiri secara keuangan dan membantu mengurangi beban APBD, jadi anggaran pada sub kegiatan ini dialihkan ke sub kegiatan bersifat investasi. Hal ini sejalan dengan instruksi dari Ketua Dewan Pengawas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	381.215.000	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	Anggaran Gaji ASN diakomodir oleh Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Sub Kegiatan ini semula memiliki anggaran sebesar Rp. 313.025.000 kemudian dilakukan evaluasi sehingga saat ini pagu anggarannya menjadi Rp. 0 karena berdasarkan analisa kemampuan keuangan rumah sakit, anggaran sub kegiatan yang bersifat operasional diakomodir melalui BLUD sebagai komitmen mandiri secara keuangan dan membantu mengurangi beban APBD, jadi anggaran pada sub kegiatan ini dialihkan ke sub kegiatan bersifat investasi. Hal ini sejalan dengan instruksi dari Ketua Dewan Pengawas RSUD Aji Batara

			Agung Dewa Sakti
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	356.215.000	Besaran anggaran sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	25.000.000	Peningkatan kualitas penatausahaan keuangan yang akuntabel
1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	20.000.000	
1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.000.000	Peningkatan kualitas penatausahaan keuangan yang akuntabel
1.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.000.000	Peningkatan kualitas penatausahaan keuangan yang akuntabel
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.243.140.000	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.243.140.000	Besaran anggaran sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.655.910.656	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.655.910.656	Besaran anggaran sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	61.200.000.000	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	61.200.000.000	Sub Kegiatan ini mengakomodir pelaksanaan pemenuhan kebutuhan operasional Rumah Sakit meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, Sub Kegiatan ini mengakomodir pemenuhan SPM RS sesuai dengan amanat peraturan: • Kepmenkes No 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit • Kepmenkes No 1128 Tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit Sub Kegiatan ini juga mengakomodir pelaksanaan amanat implementasi kinerja reformasi birokrasi tematik, yaitu: • Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, dalam bentuk penyuluhan oleh Tim Medis yang terdiri dari Dokter Spesialis Anak, Perawat, Bidan, dan Ahli Gizi • Penanggulangan Kemiskinan, dalam bentuk pembebasan biaya bagi pasien tidak mampu yang ketika

			dirawat di RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, ternyata tidak memiliki BPJS, tidak terdata sebagai warga tidak mampu, dan tidak mendapat bantuan dari Dinas Sosial dan/atau Kecamatan Samboja

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	108.805.244.989	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	108.805.244.989	
1.02.02.2.01.05	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	-	Sub Kegiatan ini semula memiliki anggaran sebesar Rp. 602.898.080 kemudian dilakukan evaluasi sehingga saat ini pagu anggarannya menjadi Rp. 0 karena berdasarkan analisa kemampuan keuangan rumah sakit, anggaran sub kegiatan yang bersifat operasional diakomodir melalui BLUD sebagai komitmen mandiri secara keuangan dan membantu mengurangi beban APBD, jadi anggaran pada sub kegiatan ini dialihkan ke sub kegiatan bersifat investasi. Hal ini sejalan dengan instruksi dari Ketua Dewan Pengawas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12.805.244.989	Sub Kegiatan ini mengakomodir pelaksanaan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, sesuai dengan amanat peraturan: • Permenkes No 31 Tahun 2018 tentang Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan, untuk memenuhi standar kelengkapan yang ditentukan • Permenkes No 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit • Kepmenkes No 1128 Tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, untuk memenuhi elemen penilaian Akreditasi Rumah Sakit dari Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) Persentase kelengkapan alat kesehatan pada Aplikasi ASPAK masih di bawah standar, sehingga perlu melakukan pemenuhan standar Alat Kedokteran.

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	96.000.000.000	Sub Kegiatan ini mengakomodir pelaksanaan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, sesuai dengan amanat peraturan: • Permenkes No 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit • Kepmenkes No 1128 Tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, untuk memenuhi elemen penilaian Akreditasi Rumah Sakit dari Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) Pemenuhan standar bangunan kesehatan dalam rangka pelaksanaan pengembangan rumah sakit yang tercantum pada Review Masterplan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021. Tahun 2023 telah dilaksanakan penyusunan perencanaan berupa DED bangunan Tahun 2024 telah dilaksanakan pembangunan gedung tahap 1 Pengembangan Jenis Layanan Tingkat Lanjut Rawat Jalan Dalam Rangka Menjadi Rumah Sakit Tipe B, melalui Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Jalan Tahap 2 Peningkatan Kapasitas Rawat Inap Dalam Rangka Menjadi Rumah Sakit Tipe B, melalui Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	-	Sub Kegiatan ini semula memiliki anggaran sebesar Rp. 256.562.000 kemudian dilakukan evaluasi sehingga saat ini pagu anggarannya menjadi Rp. 0 karena berdasarkan analisa kemampuan keuangan rumah sakit, anggaran sub kegiatan yang bersifat operasional diakomodir melalui BLUD sebagai komitmen mandiri secara keuangan dan membantu mengurangi beban APBD, jadi anggaran pada sub kegiatan ini dialihkan ke sub kegiatan bersifat investasi. Hal ini sejalan dengan instruksi dari Ketua Dewan Pengawas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.500.000.000	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000.000	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000.000	Dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, Sub Kegiatan ini mengakomodir pemenuhan SPM RS sesuai dengan amanat peraturan: • Kepmenkes No 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit • Kepmenkes No 1128 Tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit Dalam upaya pemenuhan indikator SPM RS target indikator ditingkatkan dari 100 orang menjadi 300 orang (60% dari jumlah karyawan RS), menyesuaikan target standar capaian SPM RS, sehingga dilakukan penambahan anggaran
		187.805.510.645	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Rencana Kerja (Renja) didiskusikan pada pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Rencana Kerja (Renja) dengan kesepakatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara di Kecamatan. Pada forum Perangkat Daerah tidak terdapat usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti baik dari kelompok masyarakat, asosiasi, LSM, Perguruan Tinggi, dan dari SKPD lain di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel membuat RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti berkomitmen untuk terus berbenah, memperbaiki, dan meningkatkan pelayanannya. Hal ini tergambar dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yang tiap tahunnya meningkat.

Tabel 16. Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020- 2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Tujuan RPJMN IV tahun 2020–2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (*goals*) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan. Sedangkan strategi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan arah kebijakan yaitu:

1. Pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pemberian tunjangan kemahalan bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah terpencil/perbatasan.
2. Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit.
3. Peningkatan pelayanan dasar kesehatan dasar dan rujukan.
4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin.

RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menjalankan beberapa kebijakan nasional bidang kesehatan dan telah melaksanakan apa yang menjadi sasaran strategis Kementerian Kesehatan yaitu, menekan angka kematian Ibu dan Bayi, pelaksanaan pengobatan pasien TB, dan pelaksanaan Program *Millenium Development Goals* (MDGs), serta melayani peserta JKN.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 berdasarkan pada rumusan strategis penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Tujuan

   Tujuan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 yang terkait dengan tugas dan fungsi adalah "Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti" dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

2. Sasaran

   Sasaran Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 adalah "Meningkatkan Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti" dengan indikator sebagai berikut:

   a. Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
   b. Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target

Tabel 17. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja		
		2023	2024	2025
Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,50%	82,00%	82,50%
Meningkatnya Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	80,50% (Paripurna)	80,50% (Paripurna)	80,50% (Paripurna)
	Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target	75,50%	76,00%	76,50%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

4.1.1 Faktor yang Menjadi Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

   Berpedoman pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, maka RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti melaksanakan Misi kedua yaitu Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul, dan Berbudaya. Pada misi ini tertuang Program Dedikasi yaitu Program Keluarga Peduli di mana peran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yaitu sebagai pengampu program yang bertugas dalam proses meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.

2. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

   RSUD Aji Batara Agung Dewa melaksanakan salah satu sasaran strategis Kementerian Kesehatan yaitu, menekan angka kematian Ibu dan Bayi, pelaksanaan pengobatan pasien TB, dan pelaksanaan Program *Millenium Development Goals* (MDGs), serta melayani peserta JKN.

3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

   Melaksanakan amanat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, pada hakekatnya SPM rumah sakit merupakan jenis-jenis pelayanan rumah sakit yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit dengan standar kinerja yang ditetapkan.

4.1.2 Uraian Garis Besar Program dan Kegiatan

RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti pada tahun 2025 melaksanakan 3 Program dan 7 Kegiatan serta 10 Sub Kegiatan, dengan pagu indikatif sebesar Rp.187.805.510.645,-

Tabel 18. Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	RSUD ABADI	73,50 Sangat Baik / BB	77.500.265.656	APBD, BLUD		74,00 Sangat Baik / BB	85.909.574.197
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD ABADI	-	-	-		6 Dokumen	297.295.000
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	-	-	-	Lihat Tabel 15	5 Dokumen	277.835.000
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSUD ABADI	-	-	-	Lihat Tabel 15	1 Dokumen	19.460.000
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	RSUD ABADI	2 Laporan	381.215.000	APBD		2 Laporan	17.688.615.728
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD ABADI	-	-	-	Lihat Tabel 15	118 Orang/ Bulan	17.019.375.728

1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RSUD ABADI	-	-	-	Lihat Tabel 15	2 Laporan	313.025.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	RSUD ABADI	3 Laporan	356.215.000	APBD	Lihat Tabel 15	3 Laporan	356.215.000
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	RSUD ABADI	1 Laporan	25.000.000	APBD	Lihat Tabel 15		
1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	1 Laporan	20.000.000	APBD		-	-
1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD ABADI	1 Dokumen	10.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	-	-
1.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD ABADI	1 Laporan	10.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	-	-
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD ABADI	1 Layanan	1.243.140.000	APBD		-	-
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD ABADI	12 Laporan	1.243.140.000	APBD	Lihat Tabel 15	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	RSUD ABADI	12 Bulan	14.655.910.656	APBD		12 Bulan	14.655.910.656
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	RSUD ABADI	12 Laporan	14.655.910.656	APBD	Lihat Tabel 15	12 Laporan	14.655.910.656
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	RSUD ABADI	75	61.200.000.000	BLUD		75	53.267.752.813
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	RSUD ABADI	1 Unit kerja	61.200.000.000	BLUD	Lihat Tabel 15	1 Unit kerja	53.267.752.813
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	RSUD ABADI	82 Persen	108.805.244.989	APBD		-	-
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar	RSUD ABADI	4 Kategori	108.805.244.989	APBD		-	-
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	RSUD ABADI	-	-	-	Lihat Tabel 15	-	-
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	RSUD ABADI	10 Unit	12.805.244.989	APBD	Lihat Tabel 15	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	RSUD ABADI	1 Unit	96.000.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang Menerapkan Standar Pelayanan	RSUD ABADI	-	-	-		-	-
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	-	-	-	Lihat Tabel 15	-	-
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDMK yang Kompeten	RSUD ABADI	100 Persen	1.500.000.000	APBD		-	-
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK yang Ditingkatkan Kompetensinya	RSUD ABADI	60 Persen	1.500.000.000	APBD		-	-
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	RSUD ABADI	280 Orang	1.500.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	-	-
					187.805.510.645				85.909.574.197

BAB V
PENUTUP

1. Pengembangan Jenis Layanan Tingkat Lanjut Rawat Jalan Dalam Rangka Menjadi Rumah Sakit Tipe B.
2. Peningkatan Kapasitas Rawat Inap Dalam Rangka Menjadi Rumah Sakit Tipe B.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

1. Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 yang disertai Rencana kerja dan Anggaran (RKA) digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.
2. Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 digunakan juga sebagai pertimbangan untuk penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun 2025 yang dapat dimanfaatkan oleh jajaran rumah sakit sendiri maupun *stakeholder* yang berkepentingan.

Semoga Rencana Kerja ini dapat dipedomani sebagai alat kendali perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi kinerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti.

mm.RSUD DAYAKU RAJA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (RENJA PD) untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan yang memuat kebijakan program dan kegiatan. Fungsi Renja RSUD Dayaku Raja adalah sebagai acuan dalam penyenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam membantu pemerintah membangun daerah dalam hal bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Renja RSUD Dayaku Raja memuat hasil evaluasi renja tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran Renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Dayaku Raja tahun 2021 - 2026.

Penyusunan Renja PD mengacu pada Rancangan Akhir RKPD dan surat edaran dari Kepala Daerah, perihal penyampaian Rancangan Akhir RKPD sebagai bahan penyusunan Rancangan Renja PD dengan berdasarkan review hasil evaluasi Renja tahun lalu yang berdasarkan Renstra PD. Hasil dari rancangan Renja PD akan dilakukan sinkronisasi kebijakan Nasional sebagai bahan penyusunan RKPD.

RSUD Dayaku Raja memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas dan fungsi menjalankan sebagaian urusan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026, dengan Visi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021- 2026 adalah *" Mewuiudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang SeJahtera dan Berbahagia"*

Adapun misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif Efisien dan Melayani;

2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan lnfrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,maka RSUD Dayaku Raja sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu untuk menyusun Rencana KerjaTahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah RSUD Dayaku Raja Tahun 2025 dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8 Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9 Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

13 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

15 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

1. Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaksanaan pembangunan dalam PD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan.

b. Tujuan

1. Untuk mensinkronisasikan program dan kegiatan tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah.
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
3. Sebagai bahan evaluasi perencanaan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4. 1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.

Terdapat ada 4 program yang dilaksanakan di dalam Renstra RSUD Dayaku Raja termasuk didalamnya yang mengakomodir kegiatan BLUD. Dengan 14 kegiatan dan 40 sub kegiatan. Begitu juga dengan Program dan kegiatan pada tahun 2023 secara fisik rata-rata sudah mencapai target kinerja, namun masih ada program yang belum mencapai 100% dari target kinerja dan keuangan mencapai 48.8 %.
Program - program yang realisasi fisiknya hampir mencapai 100 % antara lain :

No.	Program/ Indikator	Target	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		
a	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70 Nilai	64,5 Nilai
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
a	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal(SPM) RS	85 Persen	84,11 Persen
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		
a	Persentase SDM yang Terlatih Sesuai Kompetensinya	20 Persen	20 Persen
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		
a	Persentase Penggalangan Kerjasama RS dengan pihak ke tiga	100 Persen	100 Persen

Jika menelaah realisasi program dan kegiatan yang di laksanakan oleh RSUD Dayaku Raja Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2023 ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat mengalami peningkatan, namun demikian keluhan-keluhan yang lain akan

tetap menjadi perhatian khusus yang harus ditangani secara baik oleh RSUD Dayaku Raja Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan adanya hasil survey kepuasaan dengan nilai 81,22 % dari target 80 % pasien puas terhadap pelayanan RSUD Dayaku Raja, ini merupakan bukti masyarakat sudah mulai memberikan rasa kepercayaan terhadap pelayanan yang diberikan oleh RSUD Dayaku Raja sehingga secara tidak langsung dapat juga menumbuhkan daya saing yang sehat serta pertumbuhan ekonomi. Sebagai Rumah Sakit Pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan, dukungan Pemerintah Daerah dan masyarakat merupakan hal yang paling utama untuk belanja – belanja yang sifatnya operasional RSUD Dayaku Raja Kabupaten Kutai Kartanegara.

Renja RSUD Dayaku Raja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 secara langsung telah mampu mengelola pendapatannya sehingga hal – hal yang menyangkut pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan memerlukan penanganan yang cepat dan sifat darurat dapat ditangani secara langsung menggunakan dana BLUD.

Tabel. T-C 29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja- Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra - Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)*

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja -PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2024)	
							Target Renja - PD Tahun (2023)		Realisasi Renja -PD Tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	Nilai	65	Nilai	70	Nilai	64,5	Nilai	92%	75	Nilai	204,5	241%

	KABUPATEN/KOTA														
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	120	Dokumen	24	Dokumen	24	Dokumen	24	Dokumen	100%	24	Dokumen	72	60%
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40	Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	100%	8	Doku	24	60%
													men		
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhisar Realisasi Kinerja SKPD	20	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	4	Dokumen	12	60%
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	36	60%
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel*	*5*	Laporan	*1*	Laporan	*1*	Laporan	*1*	Laporan	100%	*1*	Laporan	3	60%
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%		Bulan	12	20%
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	5	Dokumen	1	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	25	500%
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah*	*5*	Dokumen	*1*	Dokumen	*1*	Dokumen	*1*	Dokumen	100%	*1*	Dokum	1	20%

													en		
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	5	Dokumen	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	20%
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaain Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*250*	Orang	*50*	Orang						*0*	Orang	50	20%
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendaptakan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	250	Orang	50	Orang						0	Orang	50	20%
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	125	Dokumen	28	Orang	25	Orang	25	Orang	100%	0	Dokumen	53	42%
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*35*	Layanan	*7*	Layanan	*7*	Layanan	*7*	Layanan	100%	*7*	Layanan	21	60%
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	60	Jenis	13	Jenis	11	Paket	11	Paket	100%	11	Jenis	35	58%
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5	Jenis	12	Jenis	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	14	280%

1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	145	Jenis	2	Jenis	30	Paket	30	Paket	100%	30	Paket	62	43%
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Orang yang di sediakan Makan Minum	25000	Kotak	5000	Kotak	5000	Paket	5000	Paket	100%	5000	Kotak	15000	60%
1.02.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Waktu Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	60	Kali	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100%	12	Paket	36	60%
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	paket	28	Orang/ Kali	30	Laporan	30	Laporan	100%	30	Laporan	88	587%
1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	15	Berkas	3	Berkas	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Berkas	5	33%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	300	60%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang di sediakan	50	Unit		Unit									
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disedikan	4	Bangunan		Bangunan									
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disedikan	500	M2	100	M2	100	M2	100	M2	100%	100	M2	300	60%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	*60*	Bulan	*12*	Bulan	*12*	Bulan	*12*	Bulan	100%	*12*	Bulan	36	60%

1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Waktu Ketersediaan Jasa Surat Menyurat	5000	Materai	12	Bulan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	1%
1.02.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bulan	12	Bulan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	24	40%
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Bulan	12	Bulan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	60%
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS 3. Penyediaan Jasa Keamanan	60	Bulan	12	Bulan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	60%
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	350	Persen	70	Persen	70	Persen	70	Persen	100%	70	Persen	20	60%
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	25	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	100%	5	Unit	15	60%
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	60	Unit	12	Unit	16	Unit	16	Unit	100%	16	Unit	32	53%

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	48	Kali	Kali	12	Unit	12	Unit		12	Unit	24	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	60	Gedung	13 Gedung	13	Gedung	13	Gedung	100%	13	Unit	39	65%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	48	Kali	- Kali	Kali		Kali						
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD RSUD	5	Nilai	1 Nilai	1	Nilai	1	Nilai	100%	1	Nilai	3	60%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Kunjungan Pasien	135000	Pasien	25000 Pasien	25000	Pasien	25000	Pasien	100%	25000	Pasien	75000	56%
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal(SPM) RS	425	Persen	85 Persen	85	Persen	85	Persen	100%	85	Parsen	255	60%
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Sesuai Standar	350	Persen	70 Persen	70	Persen	70	Persen	100%	70	Persen	210	60%
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang di Bangun	2	Bangunan										

1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Dokter Spesialis yang Dibangun	15	Bangunan	3	Bangunan							Bangunan/Gedung	3	20%
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Fasilitas Rumah Sakit	2	Bangunan	-	Bangunan						2	Bangunan/Gedung		
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya	2	Ruangan	-	Ruangan									
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Ruangan yang di rehab	5	Ruangan	2	Ruangan	1	Ruangan	1	Ruangan	100%		Ruangan	3	60%
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Bangunan yang di Rehab	5	Bangunan	1	Bangunan							Bangunan	1	20%
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang di bangun	5	Bangunan	1	Bangunan	1	Bangunan	1	Bangunan	100%		Bangunan	2	40%
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Prasarana Pendukung Rumah Sakit yang tersedia	5	Unit	2	Bangunan	2	Bangunan	2	Bangunan	100%		Paket	4	80%
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya alat - alat kesehatan rumah sakit	5	Paket	1	Paket	41	Unit	41	Unit	100%		Unit	42	840%

1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan	10	Paket	Paket		2	Jenis	2	Jenis	100%	Paket	2	20%
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai Medis dan Non Medis	30	Paket	5	Jenis	5	Jenis	5	Jenis	100%	Paket	10	33%
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Luas Taman yang Dipelihara	28875	M2	5775	M2	5775	M2	5775	M2	100%	M2	11550	40%
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Waktu Pemeliharaan Perasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	60	Kali	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	Bulan	24	40%
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah waktu Alat Kesehatan yang dipelihara	60	Kali	12	Bulan	12	Kali	12	Kali	100%	12	Bulan	36	60%
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan											7	Paket		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Rumah Sakit yang sesuai standar	375	Persen	75	Persen	75	Persen	75	Persen	100%	75	Persen	225	60%
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah waktu penyediaan Bahan Makan Minum Pasien	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	Bulan	24	40%
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah waktu Pemeriksaan dan Pemusnahan Limbah B3	60	Kali	12	Bulan	12	Kali	12	Kali	100%	12	Bulan	36	60%

1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Sertifikat Akreditasi RS	5	Sertifikat	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	60%
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tersedia dan Terselenggaranya Sistem Infomasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100	Persen	Persen		80	Persen	80	Persen		80	Persen	160	160%
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Peralatan SIM RS yang tersedia	4	Kegiatan	Kegiatan		30	Unit	30	Unit				30	750%
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											1	Dokumen	1	#DIV/0!
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang Terlatih Sesuai Kompetensinya	80	Persen	Persen		20	Persen	20	Persen		20	Persen	40	50%
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan	2	Dokumen	Dokumen		Dokumen		Dokumen					0	0%
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia sesuai Standar	Jumlah Dokumen	2	Dokumen	Dokumen		Dokumen		Dokumen					0	0%
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang Terlatih Sesuai Kompetensinya	80	Persen	Persen		50	Persen	50	Persen		50	Persen	100	125%

	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yg mengikuti pelatihan	200	Orang	Orang		50	Orang	50	Orang		50	Persen	100	50%
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penggalangan Kerjasama RS	500	Persen	100	Perse n	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	300	60%
		dengan pihak ke tiga													
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kerjasama Rumah Sakit dengan Pihak Ketiga	5	Jenis	1	Jenis	1	Jenis	1	Jenis	100%	1	Jenis	3	60%
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kerjasama RS dengan dokter spesialis/residen	210	Orang	42	Orang	42	Orang	42	Orang	100%	2	Dokumen	86	41%

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No 17 Tahun 2018 ada 20 jenis pelayanan yang wajib dilaksanakan rumah sakit dengan 160 indikator. Dengan capaian standar pelayanan Minimal RSUD Dayaku Raja Indikator atau rincian sebagai berikut :

1. Pelayanan Gawat Darurat, ada 8 (delapan) indikator yaitu ;
    a. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa (100%);
    b. Pemberian pelayanan gawat darurat bersertifikat yang masi hberlaku (100%);
    c. Ketersediaan tim penanggulangan bencana (1 tim);
    d. Jam buka pelayanan gawat darurat 24 jam;
    e. Waktu tanggap pelayanan dokter digawat darurat (respon time ≤ 5 menit);
    f. Tidak adanya keharusan membayar uang muka (100%);
    g. Kematian pasien di IGD ≤ 8 jam (≤ 2 perseribu);dan
    h. Kepuasan Pelanggan (≥70%).
2. Pelayanan Rawat Jalan, ada 10 (sepuluh) indikatoryaitu :
    a. Ketersediaan pelayanan (Sesuai Kelas RS);
    b. Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis (Sesuai Kelas RS);
    c. Jam buka pelayanan dengan ketentuan 07.30 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali jumat : 07.30-10.00 (100%);
    d. Waktu tunggu rawatj alan (≤ 60 menit);
    e. PenegakanDiagnosi TB melalui pemeriksaan mikroskopis (100%);
    f. Pasien Rawat Jalan TB yang ditanganidengan strategi DOTS (100%;);
    g. KetersediaanPelayanan VCT (tersedia dengan tenaga terlatih);
    h. Peresepanobatsesuaiformularium (100%);
    i. Pencatatan dan pelaporan TB di RS (≥ 60%);dan
    j. Kepuasa npasien (≥ 90%).

3. Pelayanan Rawat Inap, ada 11 (sebelas) indikator yaitu :
    a. Ketersediaan Pelayanan (Sesuai Kelas RS);
    b. Pemberian pelayanan di rawat inap (100%);
    c. Tempat tidur dengan Pengaman (100%);
    d. Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan (100%);
    e. Dokter penanggung jawab pasien rawati nap (100%);
    f. Jam visit Dokter spesialis 08.00 s/d 14.00 (≥80%);
    g. Kejadian Infeksi Pasca Operasi (≤1,5%);
    h. Kejadian infeksi nosocomial (≤9%);
    i. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian (100%);
    j. Pasien Rawat Inap Tuberculosis yang ditangani dengan Strategi DOTS (100%);
    k. Pencatatan dan Pelaporan TB di RumahSakit (≥ 60%);
    l. Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh (≤5%);
    m. Kematian pasien ≥ 48 jam (≤24 perseribu);dan
    k. KepuasanPelanggan (≥ 90%).
4. Pelayanan Bedah Sentral, ada 16 (enam belas) indicator yaitu :
    a. Ketersediaan tim bedah (Sesuai dengan kelas RS);
    b. Ketersediaan Fasilitas dan Peralatan Operasi (Sesuai dengan Kelas Rumah Sakit);
    c. Kemampuan Melakukan Tindakan Operatif (100%);
    d. Waktu tunggu operasi elektif (≤2 hari);
    e. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi (100%);
    f. Tidak adany akejadian operasi salah orang (100%);
    g. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi (100%);
    h. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi (100%);
    i. Komplikasi anestesi karena *over dosis reaksianestesi* dan salah penempatan *endotracheal tube* (≤6%);
    j. Kejadian kematian di meja operasi (≤1%);dan
    k. Kepuasan Pelanggan (≥ 90%)
5. Pelayanan Rawat Inap Persalinan dan *Perinatologi*, ada 15 (lima belas) indikator yaitu :
    a. Pemberi pelayanan persalinan normal (100%);
    b. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit (Tim PONEK terlatih);

c. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi (100%);
d. Kemampuan menangani BBLR 1500-2500 gr (100%);
e. Kemampuan menangani bayi lahir dengan asfiksia (100%);
f. Pertolongan persalinan melalui seksiocaesaria non rujukan (≤20%);
g. Pelayanan kontrasepsi mantap yang Dilakukan oleh tenaga kompeten (100%);
h. Konseling Peserta KB Mantap oleh Bidan terlatih (100%);dan
i. Kematian ibu karena persalinan (a. perdarahan ≤ 1%, b. pre-kklampsia ≤30%, c. Sepsis ≤0,2%).
j. Kepuasan pasien (≥80%)

6. Pelayanan Intensif, ada 7 (tujuh) indikator yaitu :
   a. Pemberipelayanan (sesuaikelas RS);
   b. Ketersediaan fasilitas dan peralatanruang ICU (sesuai kelas RS);
   c. Ketersediaan tempat tidur dengan monitoring dan ventilator (sesuai kelas RS);
   d. Kepatuhan terhadap hand hygiene (100%);
   e. Kejadian infeksi nosocomial (≤9%);
   f. Pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam (≤ 3%);dan
   g. Kepuasan pelanggan (≥ 80 %).
7. Pelayanan Instalasi Radiologi, ada 7 (tujuh) indicator yaitu :
   a. Pemberi pelayanan radiologi (Dokter spesialis radiologi, *Radiografer*)
   b. Ketersediaan fasilitas dan peralatan radiografi (Sesuai dengan kelas RS);
   c. Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax (≤ 3 jam);
   d. Kerusakan foto (≤ 2%);
   e. Tidak terjadinya kesalahan pemberian label (100%);
   f. Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan radiologi (100%);dan
   g. Kepuasan pelanggan (≥80%).

8. Pelayanan Instalasi Laboratorium, ada 7 (tujuh) indikator yaitu :
    a. Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik (dokter Sp.PK dan analis);
    b. Fasilitas dan peralatan (Sesuai kelas RS);
    c. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium patologi klinik (≤120 menit);
    d. Tidak adanya kejadian tertukar specimen (100%);
    e. Kemampuan memeriksa HIV-AIDS (Tersedia tenaga, peralatan, dan *reagen*);
    f. Kemampuan Mikroskopis TB Paru (Tersedia)
    g. Ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium (100%)
    h. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium (100%);
    i. Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal (100%); dan
    j. Kepuasan pelanggan (≥80%)
9. Pelayanan Instalasi Farmasi, ada 8 (delapan) indikator yaitu :
    a. Pemberi pelayanan farmasi (Sesuai Kelas RS);
    b. Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi (Sesuai kelas rumah sakit);
    c. Ketersediaan formularium (Tersedia dan updated paling lama 3 tahun);
    d. Waktu tunggu pelayanan obat jadi (≤ 30 menit);
    e. Waktu tunggu pelayanan obat racikan (≤ 60 menit);
    f. Tidak adanya kejadian kesalahanpemberian obat racikan (100%);dan
    g. Kepuasan pelanggan (≥80%).
10. Pelayanan Gizi, ada 6 (enam) indicator yaitu :
    a. Pemberi pelayanan gizi (Sesuai kelas RS);
    b. Ketersediaan pelayanan konsultasi gizi (Sesuai kelas RS);
    c. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien (≥ 90%);
    d. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet (100%);
    e. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien (≤ 20%);dan
    f. Kepuasan pelanggan (≥ 80%).

11. Pelayanan Transfusi Darah ada 4 (empat) indicator yaitu :
    a. Tenaga penyedia pelayanan bank darah rumah sakit (Sesuai standar BDRS);
    b. Ketersediaan fasilitas dan peralatan bank darah rumah sakit (Sesuai standar BDRS);
    c. Kejadian infeksi transfuse (≤ 0,01%);
    d. Pemenuhan kebutuhan darah untuk pelayanan transfusi di rumah sakit (100%);dan
    e. Kepuasan pelanggan (≥80%).
12. Pelayanan Rekam Medik, ada 6 (enam) indicator yaitu :
    a. Pemberi pelayanan Rekam Medik (Sesuai kelas RS);
    b. Waktu penyediaan dokumen Rekam medic rawat jalan (≤ 10 menit);
    c. Waktu penyediaan rekam medic pelayanan rawat inap (≤ 15 menit);
    d. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan (100%);
    e. Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas (100%);dan
    f. Kepuasan Pelanggan (≥ 80%).
13. Pengelolaan Limbah, ada 4 (empat) indikator yaitu :
    a. Adanya penanggung jawab pengelola limbah rumah sakit (Sesuai Kelas RS);
    b. Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah rumah sakit (Sesuai Kelas RS);
    c. Pengelolaan Limbah Cair (Sesuai Kelas RS);
    d. Pengelolan Limbah Padat (Sesuai Kelas RS);
    e. Baku mutu limbah cair;
        1) BOD < 30 mg/l;
        2) COD < 80 mg/l;
        3) TSS < 30 mg/l;dan
        4) PH 6-9.
14. Administrasi dan Manajemen ada indikator yaitu :
    a. Kelengkapan pengisian jabatan sesuai persyaratan jabatan dalam struktur organisasi (≥ 90%);

b. Adanya peraturan internal rumah sakit (Ada);
c. Adanya Peraturan Karyawan Rumah Sakit (Ada);
d. Adanya Daftar Urutan Kepangkatan Karyawan (Ada);
e. Adanya Perencanaan Strategis Bisnis Rumah Sakit (Ada);
f. Adanya Perencanaan Pengembangan SDM (Ada);
g. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi (100%);
h. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat (100%);
i. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala (100%);
j. Pelaksana rencana pengembangan SDM (≥90%);
k. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan (≥90%);
l. Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap (≤ 2 jam);
m. Cost Recovery (≥ 60%);
n. Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja (100%);
o. Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun (≥ 60%);dan
p. Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan waktu (100%).

15. Ambulance ada 3 (tiga) indikator yaitu :
    a. Ketersediaan Pelayanan Ambulanc dan Mobil Jenazah (24 Jam);
    b. Penyedia Pelayanan Ambulas dan Mobil Jenazah (Supir Ambulans Terlatih);
    c. Ketersediaan Mobil Ambulans dan Mobil Jenazah (Mobil Ambulans dan Mobil Jenazah terpisah);
    d. Kecepatan memberikan pelayanan Ambulans/Mobil Jenazah di Rumah Sakit (≤ 30 menit);
    e. Waktu tanggap Pelayanan Ambulans kepada Masyarakat yang membutuhkan (≤ 30 menit);
    f. Tidak terjadinya kecelakaan ambulans/mobil jenazah yang menyebabkan kecacatan atau kematian (100%);dan
    g. Kepuasan pelanggan (≥ 80%).
16. Pemulasaran Jenazah ada
    a. Ketersediaan pelayanan pemulasaran jenazah (24 Jam);
    b. Ketersediaan Fasilitas Kamar Jenazah (sesuai kelas Rumah Sakit);

c. Ketersedian Tenaga di Intstalasi perawtan jenazah (sesuai kelas Rumah Sakit);
d. Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah (100%);
e. Perawatan jenazah sesuai standar universal precaution (100%);
f. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi jenazah (100%);dan
g. Kepuasan pelanggan (≥ 80%).

17. Pelayanan Laundry ada 7 (tujuh) indikator yaitu :
    a. Ketersediaan pelayanan laundry (tersedia);
    b. Adanya penanggung jawab pelayanan laundry (SK Direktur);
    c. Ketersediaan fasilitas dan peralatan laundry (Sesuai Kelas RS);
    d. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap dan ruang pelayanan (100%);
    e. Ketepatan pengelolaan linen infeksius (100%);
    f. Ketersediaan linen (2,5-3 set x jumlah tempat tidur);dan
    g. ketersediaan linen steril untuk kamar operasi (100%)
18. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit ada 6 (Enam) indikator yaitu:
    a. Adanya penanggung jawab IPSRS (SK Direktur);
    b. Ketersediaan bengkel kerja (Tersedia);
    c. Waktu tanggap kerusakan ≤ 15 menit (80%);
    d. Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan (100%);
    e. Ketepatan waktu kalibrasi alat (100%);dan
    f. Alat ukur dan alat laboratorium yang dkalibrasi tepat waktu (100%).
19. Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) ada 6 (Enam) indikator yaitu :
    a. Adanya anggota tim PPI yang terlatih (Anggota tim PPI yang terlatih 75%);
    b. Ketersediaan APD di setiap instalasi/departemen (≥ 75%);
    c. Rencana program PPI (Ada);
    d. Pelaksanaan program PPI sesuai rencana (Ada);

e. Penggunaan APD saat melaksanakn tugas (100%);dan
f. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/ *Healthcare Associated Infection* (HAI) di rumah sakit (≥75%)

20. Pelayanan Keamanan ada 6 (Enam) indikator yaitu :
    a. Petugas Keamanan bersertifikat (100%);
    b. Sistem Pengamanan (100%);
    c. Petugas Keamanan melakukan keliling Rumah Sakit (100%);
    d. Evaluasi terhadap sistem Pengamanan (100%);
    e. Tidak adanya barang milik pasien,Pengunjung, karyawan yang hilang (100%);dan
    f. Kepuasan Pelanggan (≥ 90%).

Tabel T-C. 30
Pecapaian Kinerja Pelayanan RSUD Dayaku Raja KabupatenKutaiKartanegara

NO	INDIKATOR SPM		SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET				REALISASI		PROYEKSI		Catatan Hasil Analisis
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	PELAYANAN IGD	Kemampuan menangani life saving			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Pemberi pelayanan kegawatdarurat an bersertifikat (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS) yang masih berlaku			100 %	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
		Ketersediaan tim penanggulangan bencana			1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 TIM	0	1 Tim	1 Tim	
		Jam buka pelayanan gawat darurat 24 jam			24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 JAM	24 Jam	24 Jam	24 Jam	
		Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat (respon time)			≤5 menit dilayani setelah pasien	≤5 menit dilayani setelah pasien	≤5 menit dilayani setelah pasien datang	≤5 menit dilayani setelah pasien datang	4, 18 menit	1,98 menit	≤5 menit dilayani setelah pasien	≤5 menit dilayani setelah pasien	

					data ng	datan g					datan g	datan g	
		Tidak adanya keharusan membayar uang muka			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Kematian pasien di IGD (≤ 8 jam)			≤ 2 pers erib u	≤ 2 perser ibu	≤ 2 perseri bu	≤ 2 perseri bu	0,009	0.0014	≤ 2 perser ibu	≤ 2 perser ibu	
		Kepuasan Pasien			≥70 %	≥70%	≥70%	≥70%	75%	85%	≥70%	≥70%	

NO	INDIKATOR SPM		SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET				REALISASI		PROYEKSI		
					202 2	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
2	PELAYANAN RAWAT INAP DEWASA	Ketersediaan Pelayanan			sesu ai deng an stan dar rum ah sakit	sesuai denga n stand ar ruma h sakit	sesuai dengan standar rumah sakit	sesuai dengan standar rumah sakit	100%	-	sesuai denga n stand ar ruma h sakit	sesuai denga n stand ar ruma h sakit	
		Pemberi Pelayanan di Rawat Inap Dewasa							Dokter Residen	Dokter Residen			
					Dokt er Spes ialis	Dokte r Spesi alis	Dokter Spesiali s	Dokter Spesiali s	a. dr. Sp. Penyakit Dalam: 1 Orang	a. dr. Sp. Penyaki t	Dokte r Spesi alis	Dokte r Spesi alis	

									Dalam: 1 Orang				
					a. dr. Sp. Penyakit Dalam: 2 Orang	a. dr. Sp. Penyakit Dalam: 2 Orang	a. dr. Sp. Penyakit Dalam: 2 Orang	b. dr. Sp. Anak: 1 Orang	b. dr. Sp. Anak: 1 Orang	a. dr. Sp. Penyakit Dalam: 2 Orang	a. dr. Sp. Penyakit Dalam: 2 Orang	
					b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	c. dr.Sp. Bedah: 1 Orang	c. dr.S p. Bedah: 1 Orang	b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	
					c. dr. Sp. Bedah: 2 Orang	c. dr.S p. Bedah: 2 Orang	c. dr.S p. Bedah: 2 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 1 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 1 Orang	c. dr. Sp. Bedah: 2 Orang	c. dr. Sp. Bedah: 2 Orang	
					d. dr. Sp. Obgyn: 2 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 2 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 2 Orang	Dokter Spesialis	Dokter Spesiali s	d. dr. Sp. Obgyn: 2 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 2 Orang	

									c. dr.Sp. Bedah: 1 Orang	c. dr.S p. Bedah: 1 Orang			
									d. dr. Sp. Obgyn: 1 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 1 Orang			
		Tempat tidur dengan Pengaman			100 %	100%	100%	100%	58%	100%	100%	100%	
		Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan			100 %	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	
		Dokter penanggung jawab pasien rawat inap			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Jam visit Dokter spesialis			08.00 s/d 14.00	08.00 s/d 14.00	08.00 s/d 14.00	08.00 s/d 14.00	99%	-	08.00 s/d 14.00	08.00 s/d 14.00	
		Kejadian Infeksi Pasca Operasi			≤1,5 %	≤1,5%	≤1,5%	≤1,5%	0%	-	≤1,5%	≤1,5%	
		Kejadian infeksi nosokomial			≤9%	≤9%	≤9%	≤9%	0%	-	≤9%	≤9%	
		Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

		Pasien rawat inap tubercolocis yang ditangani dengan strategi DOTS			100 %	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	
		Pencatatan dan pelaporan TB di RS			≥60 %	≥60%	≥60%	≥60%	100%	100%	≥60%	≥60%	
		Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh			≤5%	≤5%	≤5%	≤5%	4%	-	≤5%	≤5%	
		Kematian pasien ≥ 48 jam			≤24/1000 (0,024) atau ≤25/1000 (0,025)	≤24/1000 (0,024) atau ≤25/1000 (0,025)	≤24/1000 (0,024) atau ≤25/1000 (0,025)	≤24/1000 (0,024) atau ≤25/1000 (0,025)	1%	-	≤24/1000 (0,024) atau ≤25/1000 (0,025)	≤24/1000 (0,024) atau ≤25/1000 (0,025)	
		Kepuasan pasien			≥90 %	≥90%	≥90%	≥90%	82%	70%	≥90%	≥90%	

NO	INDIKATOR SPM		SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET				REALISASI		PROYEKSI		
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
3	PELAYANAN RAWAT INAP ANAK	Ketersediaan Pelayanan			sesu ai deng an	sesuai dengan stand	sesuai dengan standar	sesuai dengan standar	100%	-	sesuai dengan stand	sesuai dengan stand	

					stan dar rum ah sakit	ar ruma h sakit	rumah sakit	rumah sakit			ar ruma h sakit	ar ruma h sakit	
		Pemberi Pelayanan di Rawat Inap Anak							Dokter Residen	Dokter Residen			
					Dokt er Spes ialis	Dokte r Spesi alis	Dokter Spesiali s	Dokter Spesiali s	a. dr. Sp. Penyakit Dalam: 1 Orang	a. dr. Sp. Penyaki t Dalam: 1 Orang	Dokte r Spesi alis	Dokte r Spesi alis	
					a. d r. Sp. Peny akit Dala m: 2 Ora ng	a. dr. Sp. Penya kit Dala m:2 Orang	a. dr. Sp. Penyaki t Dalam: 2 Orang	a. dr. Sp. Penyaki t Dalam: 2 Orang	b. dr. Sp. Anak: 1 Orang	b. dr. Sp. Anak: 1 Orang	a. dr. Sp. Penya kit Dala m: 2 Orang	a. dr. Sp. Penya kit Dala m:2 Orang	
					b. d r. Sp. Ana k: 2 Ora ng	b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	c. dr.Sp. Bedah: 1 Orang	c. dr.S p. Bedah: 1 Orang	b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	
					c. d r.Sp. Beda h: 2	c. dr. Sp. Bedah : 2 Orang	c. dr.S p. Bedah: 2 Orang	c. dr.S p. Bedah: 2 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 1 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 1 Orang	c. dr. Sp. Bedah : 2 Orang	c. dr. Sp. Bedah : 2 Orang	

					Ora ng								
					d. d r. Sp. Obg yn: 2 Ora ng	d. dr. Sp. Obgyn : 2 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 2 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 2 Orang			d. dr. Sp. Obgyn : 2 Orang	d. dr. Sp. Obgyn : 2 Orang	
									Dokter Spesialis	Dokter Spesialis			
									c. dr.Sp. Bedah: 1 Orang	c. dr.S p. Bedah: 1 Orang			
									d. dr. Sp. Obgyn: 1 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 1 Orang			
		Tempat tidur dengan Pengaman			100 %	100%	100%	100%	58%	100%	100%	100%	
		Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan			100 %	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	
		Dokter penanggung jawab pasien rawat inap			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

		Jam visit Dokter spesialis			08.00 s/d 14.00	08.00 s/d 14.00	08.00 s/d 14.00	08.00 s/d 14.00	98%	-	08.00 s/d 14.00	08.00 s/d 14.00	
		Kejadian Infeksi Pasca Operasi			≤1,5 %	≤1,5%	≤1,5%	≤1,5%	0%	-	≤1,5%	≤1,5%	
		Kejadian infeksi nosokomial			≤9%	≤9%	≤9%	≤9%	0%	-	≤9%	≤9%	
		Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Pasien rawat inap tubercolocis yang ditangani dengan strategi DOTS			100 %	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	
		Pencatatan dan pelaporan TB di RS			≥60 %	≥60%	≥60%	≥60%	100%	100%	≥60%	≥60%	
		Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh			≤5%	≤5%	≤5%	≤5%	7%	-	≤5%	≤5%	
		Kematian pasien ≥ 48 jam			≤24/1000 (0,024) atau ≤25/1000	≤24/1000 (0,024) atau ≤25/1000 (0,025)	≤24/1000 (0,024) atau ≤25/1000 (0,025)	≤24/1000 (0,024) atau ≤25/1000 (0,025)	0,0013	-	≤24/1000 (0,024) atau ≤25/1000 (0,025)	≤24/1000 (0,024) atau ≤25/1000 (0,025)	

					(0,025)								
		Kepuasan pasien			≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	84%	63%	≥90%	≥90%	

NO	BIDANG		SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET				REALISASI		PROYEKSI		
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
4	PELAYANAN RAWAT INAP KEBIDANAN	Pemberi pelayanan persalinan normal			Dokter spesialis :	Dokter spesialis :	Dokter spesialis :	Dokter spesialis :	dokter spesialis	dokter spesialis	Dokter spesialis :	Dokter spesialis :	
					2 dr Sp. Obgyn	2 dr Sp. Obgyn	2 dr Sp. Obgyn	2 dr Sp. Obgyn	dr Sp. Obgyn: 10rang dokter residen dr Sp. Obgyn: 10rang	dr Sp. Obgyn: 10rang dokter residen dr Sp. Obgyn: 10rang	2 dr Sp. Obgyn	2 dr Sp. Obgyn	
		Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit			100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	
		Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi			Dokter SpOG, Dokter Sp.A	Dokter Spesialis Obgyn, Dokter Sp.An	Dokter SpOG, Dokter Sp.An, Dokter Sp.A	Dokter SpOG, Dokter Sp.An, Dokter Sp.A	Dokter SpOG, DokterResiden Sp.An, Dokter	Dokter SpOG, Dokter Residen Sp.An, Dokter	Dokter SpOG, Dokter Sp.An	Dokter SpOG, Dokter Sp.An	

					n, Dokt er Sp.A	, Dokte r Sp.A			Residen Sp.A	Residen Sp.A	, Dokte r Sp.A	, Dokte r Sp.A	
		Kemampuan menangani BBLR (1500-2500 gr)			100 %	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
		Kemampuan menangani bayi lahir dengan asfiksia			100 %	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
		Pertolongan persalinan melalui seksio caesaria non rujukan			≤20 %	≤20%	≤20%	≤20%	16%	-	≤20%	≤20%	
		Pelayanan kontrasepsi mantap yang Dilakukan oleh tenaga kompeten			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Konseling peserta KB mantap oleh bidan terlatih			100 %	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	
		Kematian ibu karena persalinan			a. perd arah an ≤ 1%	a. perda rahan ≤ 1%	a. perdara han ≤ 1%	a. perdara han ≤ 1%	0%	-	a. perda rahan ≤ 1%	a. perda rahan ≤ 1%	

					b. pre-kklampsia ≤30 %	b. pre-kklampsia ≤30%	b. pre-kklampsia ≤30%	b. pre-kklampsia ≤30%	0%	-	b. pre-kklampsia ≤30%	b. pre-kklampsia ≤30%	
					c. Sepsis ≤0,2 %	c. Sepsis ≤0,2%	c. Sepsis ≤0,2%	c. Sepsis ≤0,2%	0%	-	c. Sepsis ≤0,2%	c. Sepsis ≤0,2%	
		Kepuasan pasien			≥80 %	≥80%	≥80%	≥80%	85%	80%	≥80%	≥80%	

NO	BIDANG	INDIKATOR SPM	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET				REALISASI		PROYEKSI		
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
5	PELAYANAN RAWAT JALAN	Ketersediaan pelayanan			sesu ai jenis dan klari fikas i RS	sesuai jenis dan klarifi kasi RS	sesuai jenis dan klarifik asi RS	sesuai jenis dan klarifik asi RS	100%	100%	sesuai jenis dan klarifi kasi RS	sesuai jenis dan klarifi kasi RS	
		Pemberi pelayanan			Dokt er Spes ialis	Dokte r Spesi alis	Dokter Spesiali s	Dokter Spesiali s	Dokter Residen:	Dokter Residen :	Dokte r Spesi alis	Dokte r Spesi alis	
					a. d r. Sp. Peny akit Dala	a. dr. Sp. Penya kit Dala	a. dr. Sp. Penyaki t Dalam: 2 Orang	a. dr. Sp. Penyaki t Dalam: 2 Orang	a. dr. Sp. Penyakit Dalam: 1 Orang	a. dr. Sp. Penyaki t Dalam:	a. dr. Sp. Penya kit Dala	a. dr. Sp. Penya kit Dala	

					m: 2 Ora ng	m: 2 Orang				1 Orang	m: 2 Orang	m: 2 Orang	
					b. dr. Sp. Ana k: 2 Ora ng	b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	b. dr. Sp. Anak: 1 Orang	b. dr. Sp. Anak: 1 Orang	b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	b. dr. Sp. Anak: 2 Orang	
					c. dr.Sp. Beda h: 2 Ora ng	c. dr. Sp. Bedah : 2 Orang	c. dr.S p. Bedah: 2 Orang	c. dr.S p. Bedah: 2 Orang	c. dr.Sp. Bedah: 1 Orang	c. dr.S p. Bedah: 1 Orang	c. dr. Sp. Bedah : 2 Orang	c. dr. Sp. Bedah : 2 Orang	
					d. dr. Sp. Obg yn: 2 Ora ng	d. dr. Sp. Obgyn : 2 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 2 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 2 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 1 Orang	d. dr. Sp. Obgyn: 1 Orang	d. dr. Sp. Obgyn : 2 Orang	d. dr. Sp. Obgyn : 2 Orang	
									Dokter Spesialis	Dokter Spesiali s			
									a. dr.Sp. Bedah: 1 Orang	a. dr.S p. Bedah: 1 Orang			

									b. dr. Sp. Obgyn: 1 Orang	b. dr. Sp. Obgyn: 1 Orang			
		jam buka pelayanan dengan ketentuan			100 %	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
		waktu tunggu rawat jalan			≤ 60 meni t	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	94,02 Menit	-	≤ 60 menit	≤ 60 menit	
		penegakkan Diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		pasien rawat jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Ketersediaan Pelayanan VCT (HIV)			terse dia deng an tena ga terla tih	tersed ia denga n tenag a terlati h	tersedia dengan tenaga terlatih	tersedia dengan tenaga terlatih	100%	100%	tersed ia denga n tenag a terlati h	tersed ia denga n tenag a terlati h	
		peresepan obat sesuai formularium			100 %	100%	100%	100%	94,64%	-	100%	100%	
		pencatatan dan pelaporan TB di RS			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

		Kepuasan Pasien	≥90 %	≥90%	≥90%	≥90%	83,36%	88,60%	≥90%	≥90%
6	PELAYANAN LABORATOR IUM	Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik	dokt er Sp.P K dan anali s	dokter Sp.PK dan analis	dokter Sp.PK dan analis	dokter Sp.PK dan analis	100%	67%	dokter Sp.PK dan analis	dokter Sp.PK dan analis
		Fasilitas dan peralatan	Sesu ai kela s RS	Sesua i kelas RS	Sesuai kelas RS	Sesuai kelas RS	94%	47,81%	Sesua i kelas RS	Sesua i kelas RS
		Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium patologi klinik	≤120 meni t	≤120 menit	≤120 menit	≤120 menit	71,69 Menit	68,77 Menit	≤120 menit	≤120 menit
		Tidak adanya kejadian tertukar specimen	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kemampuan memeriksa HIV- AIDS	Ters edia tena ga, peral atan , dan reag en	Terse dia tenag a, perala tan, dan reage n	Tersedi a tenaga, peralat an, dan reagen	Tersedi a tenaga, peralat an, dan reagen	100%	100%	Terse dia tenag a, perala tan, dan reage n	Terse dia tenag a, perala tan, dan reage n

	Kemampuan Mikroskopis TB Paru	Ters edia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a	Tersedia	Tersedi a	Terse dia	Terse dia
	Ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium	Dokt er spes ialis:	Dokte r spesia lis:	Dokter spesiali s:	Dokter spesiali s:	100%	100%	Dokte r spesia lis:	Dokte r spesia lis:
		1 dr Sp. Patol ogi klini k	1 dr Sp. Patolo gi klinik	1 dr Sp. Patologi klinik	1 dr Sp. Patologi klinik			1 dr Sp. Patolo gi klinik	1 dr Sp. Patolo gi klinik
	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal	100 %	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%
	Kepuasan Pelanggan	≥80 %	≥80%	≥80%	≥80%	84,65%	-	≥80%	≥80%

NO	BIDANG	INDIKATOR SPM	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET				REALISASI		PROYEKSI		
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
7	PELAYANAN TRANSFUSI DARAH	Tenaga penyedia pelayanan bank darah rumah sakit			Sesuai standar BDRS	Sesuai standar BDRS	Sesuai standar BDRS	Sesuai standar BDRS	100%	100%	Sesuai standar BDRS	Sesuai standar BDRS	
		Ketersediaan fasilitas dan peralatan bank darah rumah sakit			Sesuai standar BDRS	Sesuai standar BDRS	Sesuai standar BDRS	Sesuai standar BDRS	95%	63,64%	Sesuai standar BDRS	Sesuai standar BDRS	
		Kejadian infeksi transfuse			≤ 0,01 %	≤ 0,01%	≤ 0,01%	≤ 0,01%	0%	0%	≤ 0,01%	≤ 0,01%	
		Pemenuhan kebutuhan darah untuk pelayanan transfusi di rumah sakit			100 %	100%	100%	100%	98%	98,80%	100%	100%	
		Kepuasan pelanggan			≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	85%	-	≥ 80%	≥ 80%	

NO	BIDANG	INDIKATOR SPM	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET				REALISASI		PROYEKSI		
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	

8	PELAYANAN FARMASI (Apotek rawat inap	Pemberi pelayanan farmasi			Apoteker dan Asisten	Apoteker dan Asisten	Apotek er dan Asisten Apotek er	Apotek er dan Asisten Apotek er	100%	100%	Apoteker dan Asisten	Apoteker dan Asisten	
	dan Apotek rawat jalan)				Apoteker	Apoteker					Apoteker	Apoteker	
		Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi			Sesu ai kela s rum ah sakit	Sesua i kelas ruma h sakit	Sesuai kelas rumah sakit	Sesuai kelas rumah sakit	100%	100%	Sesua i kelas ruma h sakit	Sesua i kelas ruma h sakit	
		Ketersediaan formularium			Ters edia dan upd ated palin g lama 3 tahu n	Terse dia dan updat ed paling lama 3 tahun	Tersedi a dan update d paling lama 3 tahun	Tersedi a dan update d paling lama 3 tahun	Tersedia	Tersedi a	Terse dia dan updat ed paling lama 3 tahun	Terse dia dan updat ed paling lama 3 tahun	
		Waktu tunggu pelayanan obat jadi			≤ 30 meni t	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	10,5 menit	10,23 Menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	
		Waktu tunggu pelayanan obat racikan			≤ 60 meni t	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	18,76 Menit	22,43 Menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	
		Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

		Kepuasan pelanggan			≥80 %	≥80%	≥80%	≥80%	83%	98,28%	≥80%	≥80%	

NO	BIDANG	INDIKATOR SPM	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET				REALISASI		PROYEKSI		
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
9	PELAYANAN INTENSIF	Pemberi pelayanan			dr. Spesialis Anastesiologi dan karyawan yang terlatih	dr. Spesialis Anastesiologi dan karyawan yang terlatih	dr. Spesialis Anastesiologi dan karyawan yang terlatih	dr. Spesialis Anastesiologi dan karyawan yang terlatih	Residen dr. Spesialis Anastesiologi dan karyawan (dari 12 Orang perawat 1 orang yang telah mengikuti pelatihan ICU)	Residen dr. Spesialis Anastesiologi dan karyawan yang terlatih	dr. Spesialis Anastesiologi dan karyawan yang terlatih	dr. Spesialis Anastesiologi dan karyawan yang terlatih	
		Ketersediaan fasilitas dan peralatan ruang ICU			Sesuai dengan kelas RS standar ICU	Sesuai dengan kelas RS standar ICU	Sesuai dengan kelas RS standar ICU	Sesuai dengan kelas RS standar ICU	100%	100%	Sesuai dengan kelas RS standar ICU	Sesuai dengan kelas RS standar ICU	
		Ketersediaan tempat tidur dengan monitoring dan ventilator			Sesuai dengan kelas RS stan	Sesuai dengan kelas RS stand	Sesuai dengan kelas RS standar ICU	Sesuai dengan kelas RS standar ICU	100%	100%	Sesuai dengan kelas RS stand	Sesuai dengan kelas RS stand	

					dar ICU	ar ICU					ar ICU	ar ICU	
		Kepatuhan terhadap *hand hygiene*			100 %	100%	100%	100%	78%	80%	100%	100%	
		Kejadian infeksi nosokomial			≤21 %	≤21%	≤21%	≤21%	0%	10,66%	≤21%	≤21%	
		Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam			≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%	0%	0%	≤ 3%	≤ 3%	
		Kepuasan pelanggan			≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	84%	-	≥ 80 %	≥ 80 %	

NO	BIDANG	INDIKATOR SPM	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET				REALISASI		PROYEKSI		
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
10	PELAYANAN GIZI	Pemberi pelayanan gizi			S1 Gizi, D3 Gizi tenaga lain /juru masak yang terlatih	S1 Gizi, D3 Gizi tenaga lain /juru masak yang terlatih	S1 Gizi, D3 Gizi tenaga lain /juru masak yang terlatih	S1 Gizi, D3 Gizi tenaga lain /juru masak yang terlatih	S1 Gizi, D3 gizi, tenga lain/juru masak	S1 Gizi dan tenaga lain/Juru masak	S1 Gizi, D3 Gizi tenaga lain /juru masak yang terlatih	S1 Gizi, D3 Gizi tenaga lain /juru masak yang terlatih	

		ketersediaan Fasilitas dan peralatan pelayanan Gizi			Fasilitas dan peralatan yang tesedia sesuai dengan Kelas RS	Fasilit as dan perala tan yang tesedi a sesuai denga n Kelas RS	Fasilita s dan peralat an yang tesedia sesuai dengan Kelas RS	Fasilita s dan peralat an yang tesedia sesuai dengan Kelas RS	43%	43%	Fasilit as dan perala tan yang tesedi a sesuai denga n Kelas RS	Fasilit as dan perala tan yang tesedi a sesuai denga n Kelas RS	
		Ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien			≥90 %	≥90%	≥90%	≥90%	89%	100%	≥90%	≥90%	
		Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Sisa makanan yang tidak dimakan oleh pasien			≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	33%	0,33%	≤ 20%	≤ 20%	
		Kepuasan pelanggan			≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	82%	-	≥ 80%	≥ 80%	

NO	BIDANG	INDIKATOR SPM	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET				REALISASI		PROYEKSI		
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	

11	Pemiliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Adanya penanggung jawab IPSRS			Adanya SK Direktur	Adanya SK Direktur	Adanya SK Direktur	Adanya SK Direktur	Adanya SK Direktur	Adanya SK Direktur	Adanya SK Direktur	Adanya SK Direktur	
		Ketersediaan bengkel kerja			Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		Waktu tanggap kerusakan			≥80 %	≥80 %	≥80 %	≥80 %	92%	80%	≥80 %	≥80 %	
		Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan			100 %	100%	100%	100%	67%	100%	100%	100%	
		Ketepatan waktu kalibrasi alat			100 %	100%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	
		Alat ukur dan alat laboratorium yang dkalibrasi tepat waktu			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	BIDANG	INDIKATOR SPM	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET				REALISASI		PROYEKSI		
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
12	PELAYANAN RADIOLOGI	Pemberi pelayanan radiologi			Dokter spesialis radiologi,	Dokter spesialis radiologi,	Dokter spesialis radiologi, Radiografer	Dokter spesialis radiologi, Radiografer	Dokter spesialis Radiologi Dan radiografer	Dokter Residen Radiologi Dan radiografer	Dokter spesialis radiologi,	Dokter spesialis radiologi,	

					Radiografer	Radiografer					Radiografer	Radiografer	
		Ketersediaan fasilitas dan peralatan radiografi			Sesuai dengan standar RS	Sesuai dengan standar RS	Sesuai dengan standar RS	Sesuai dengan standar RS	100%	59%	Sesuai dengan standar RS	Sesuai dengan standar RS	
		Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax			≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	32,72 Menit	1,35 Menit	≤ 3 jam	≤ 3 jam	
		Kerusakan foto			≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%	7,67%	2,46%	≤ 2%	≤ 2%	
		Tidak terjadinya kesalahan pemberian label			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan radiologi			Dokter spesialis radiologi	Dokter spesialis radiologi	Dokter spesialis radiologi	Dokter spesialis radiologi	100%	100%	Dokter spesialis radiologi	Dokter spesialis radiologi	
		Kepuasan pelanggan			≥80 %	≥80%	≥80%	≥80%	89%	96,69%	≥80%	≥80%	

NO	BIDANG	INDIKATOR SPM	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET				REALISASI		PROYEKSI		
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
13	PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT	Adanya penanggung jawab pengelola limbah rumah sakit			Surat keputusan penetapan penanggung jawab pengelolaan limbah rumah sakit	Surat keputusan penetapan penanggung jawab pengelolaan limbah rumah sakit	Surat keputusan penetapan penanggung jawab pengelolaan limbah rumah sakit	Surat keputusan penetapan penanggung jawab pengelolaan limbah rumah sakit	Adanya SK direktur penanggung jawab	Adanya SK direktur penanggung jawab	Surat keputusan penetapan penanggung jawab pengelolaan limbah rumah sakit	Surat keputusan penetapan penanggung jawab pengelolaan limbah rumah sakit	

		Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah rumah sakit : padat, cair			Sesuai dengan persyaratan kelas rumah sakit dan persyaratan	Sesuai dengan persyaratan kelas rumah sakit dan persyaratan	Sesuai dengan persyaratan kelas rumah sakit dan persyaratan permenkes No.1204	60%	60%	60%	Sesuai dengan persyaratan kelas rumah sakit dan persyaratan	60%	
					tan permenkes No.1204 Tahun 2005	permenkes No.1204 Tahun 2006	Tahun 2007				permenkes No.1204 Tahun 2007		
		Pengelolaan limbah cair			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Pengelolaan limbah padat			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Baku mutu limbah cair :											
		a. BOD < 30 mg/l			a. BOD < 30 mg/l	a. BOD < 30 mg/l	a. BOD < 30 mg/l	a. BOD < 30 mg/l	27,32 mg/l	-	a. BOD < 30 mg/l	a. BOD < 30 mg/l	

		b. COD < 80 mg/l			b. COD < 80 mg/l	b. COD < 80 mg/l	b. COD < 80 mg/l	b. COD < 80 mg/l	45,23 mg/l	-	b. COD < 80 mg/l	b. COD < 80 mg/l	
		c. TSS < 30 mg/l			c. TSS < 30 mg/l	c. TSS < 30 mg/l	c. TSS < 30 mg/l	c. TSS < 30 mg/l	3,68 mg/l	-	c. TSS < 30 mg/l	c. TSS < 30 mg/l	
		d. PH 6-9			d. PH 6-10	d. PH 6-11	d. PH 6-12	d. PH 6-13	PH 6,97	-	d. PH 6-12	d. PH 6-13	

NO	BIDANG	INDIKATOR SPM	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET				REALISASI		PROYEKSI		
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
14	PELAYANAN LAUNDRY	Ketersediaan pelayanan laundry			Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		Adanya penanggung jawab pelayanan laundry			Ada SK Direktur	Ada SK Direktur	Ada SK Direktur	Ada SK Direktur	Adanya SK Direktur	Adanya SK Direktur	Ada SK Direktur	Ada SK Direktur	
		Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap dan ruang pelayanan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Ketepatan pengelolaan linen infeksius			100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
		Ketersediaan linen			2,5-3 set x jumlah tempat tidur	2,5-3 set x jumlah tempat tidur	2,5-3 set x jumlah tempat tidur	2,5-3 set x jumlah tempat tidur	100%	100%	2,5-3 set x jumlah tempat tidur	2,5-3 set x jumlah tempat tidur	
		ketersediaan linen steril untuk kamar operasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	BIDANG	INDIKATOR SPM	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET				REALISASI		PROYEKSI		
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
15	PELAYANAN KAMAR OPERASI	Ketersediaan tim bedah			Dokter Spesialis :	Dokter Spesialis :	Dokter Spesialis :	Dokter Spesialis :	Dokter spesialis bedah 1 orang	Dokter spesialis bedah 1 orang	Dokter Spesialis :	Dokter Spesialis :	
					dr.Sp.Bedah 2 orang	dr.Sp. Bedah 2 orang	dr.Sp.Bedah 2 orang	dr.Sp.Bedah 2 orang	-	Dokter Residen Bedah 1 Orang	dr.Sp. Bedah 2 orang	dr.Sp. Bedah 2 orang	
		Ketersediaan Fasilitas Dan Peralatan Operasi			Sesuai dengan Kelas Rumah Sakit	Sesuai dengan Kelas Rumah Sakit	Sesuai dengan Kelas Rumah Sakit	Sesuai dengan Kelas Rumah Sakit	100%	51,60%	Sesuai dengan Kelas Rumah Sakit	Sesuai dengan Kelas Rumah Sakit	
		Kemampuan Melakukan Tindakan Operatif			Sesuai dengan kelas rumah Sakit	Sesuai dengan kelas rumah Sakit	Sesuai dengan kelas rumah Sakit	Sesuai dengan kelas rumah Sakit	100%	100%	Sesuai dengan kelas rumah Sakit	Sesuai dengan kelas rumah Sakit	
		Waktu tunggu operasi elektif			≤2 hari	≤2 hari	≤2 hari	≤2 hari	1 Hari	1 Hari	≤2 hari	≤2 hari	

		Tidak adanya kejadian operasi salah sisi			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Tidak adanya kejadian operasi salah orang			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Komplikasi anestesi karena overdosis reaksi anestesi dan salah penenempatan endotracheal tube			≤6%	≤6%	≤6%	≤6%	0%	0,32%	≤6%	≤6%	
		Kejadian kematian di meja operasi			≤1%	≤1%	≤1%	≤1%	0%	0%	≤1%	≤1%	
		Kepuasan Pelanggan			≥80 %	≥80%	≥80%	≥80%	87%	-	≥80%	≥80%	

NO	BIDANG			IKK	TARGET				REALISASI		PROYEKSI		
		INDIKATOR SPM	SPM/Standar Nasional		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
		Ketersediaan pelayanan ambulans dan			24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	

		mobil jenazah											
		Penyedia pelayanan ambulans dan mobil jenazah			Sopir ambulans terlatih	Sopir ambulans terlatih	Sopir ambulans terlatih	Belum Terlatih	Belum Terlatih	Sopir ambulans terlatih	Sopir ambulans terlatih		
16	PELAYANAN AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH	Ketersediaan mobil ambulans dan mobil jenazah			Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah	Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah	Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah	Tersedia	Tersedia	Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah	Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah		
		Kecepatan memberikan pelayanan ambulans /mobil jenazah di rumah sakit			≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	13,15 Menit	-	≤ 30 menit	≤ 30 menit	
		Waktu tanggap pelayanan ambulans kepada masyarakat			≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	13,73 Menit	-	≤ 30 menit	≤ 30 menit	

		yang membutuhkan											
		Tidak terjadinya kecelakaan ambulans/mobi l jenazah yang menyebabkan kecacatan atau kematian			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Kepuasan pelanggan			≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	74,74%	-	≥ 80%	≥ 80%	

NO	BIDANG	INDIKATOR SPM	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET				REALISASI		PROYEKSI		
					202 2	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
17	PELAYANAN KAMAR JENAZAH	Ketersediaan pelayanan pemulasaran jenazah			24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	
		Ketersediaan fasilitas kamar jenazah			Sesu ai kela s rum ah sakit	Sesua i kelas ruma h sakit	Sesuai kelas rumah sakit	Sesuai kelas rumah sakit	Tersedia	Tersedi a	Sesua i kelas ruma h sakit	Sesua i kelas ruma h sakit	
		Ketersediaan tenaga di Instalasi perawatan jenazah			Ada SK Dire ktur	Ada SK Direkt ur	Ada SK Direktu r	Ada SK Direktu r	Adanya SK direktur	Adanya SK direktu r	Ada SK Direkt ur	Ada SK Direkt ur	

		Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah			100 %	100%	100%	100%	91%	-	100%	100%	
		Perawatan jenazah sesuai *standar universal precaution*			100 %	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
		Tidak terjadinya kesalahan identifikasi jenazah			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Kepuasan pelanggan			≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	76,15%	-	≥ 80%	≥ 80%	

NO	BIDANG	INDIKATOR SPM	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET				REALISASI		PROYEKSI		
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
18	PENCEGAHA N DAN PENGENDAL IAN INFEKSI (PPI)	Adanya anggota tim PPI yang terlatih			Anggota tim PPI yang terlatih 75%	Anggota tim PPI yang terlatih 75%	Anggota tim PPI yang terlatih 75%	Anggota tim PPI yang terlatih 75%	65%	65%	Anggota tim PPI yang terlatih 75%	Anggota tim PPI yang terlatih 75%	
		Ketersediaan APD di setiap instalasi/departemen			≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	100%	100%	≥ 60%	≥ 60%	
		Rencana program PPI			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
		Pelaksanaan program PPI sesuai rencana			100 %	100%	100%	100%	50%	67%	100%	100%	

		Penggunaan APD saat melaksanakn tugas			100 %	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	
		Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/ *Healthcare Associated Infection* (HAI) di rumah sakit			75%	75%	75%	75%	100%	75%	75%	75%	

NO	BIDANG	INDIKATOR SPM	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET				REALISASI		PROYEKSI		
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
19	PELAYANAN KEAMANAN	Petugas keamanan bersertifikat pengamanan			100 %	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
		Sistem pengamanan			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
		Petugas keamanan melakukan keliling RS			Setia p jam	Setiap jam	Setiap jam	Setiap jam	Setiap jam	Setiap jam	Setiap jam	Setiap jam	
		Evaluasi terhadap sistem pengamanan			Setia p 3 bula n	Setiap 3 bulan	Setiap 3 bulan	Setiap 3 bulan	Setiap 3 bulan	Setiap 3 bulan	Setiap 3 bulan	Setiap 3 bulan	

		Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan yang hilang			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Kepuasan pasien			≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	-	-	≥ 90%	≥ 90%	

NO	BIDANG	INDIKATOR SPM	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET				REALISASI		PROYEKSI		
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
20	MANAJEME N	Kelengkapan pengisian jabatan sesuai persyaratan jabatan dalam struktur organisasi			≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	92,85%	-	≥ 90%	≥ 90%	
		Adanya peraturan internal rumah sakit			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
		Adanya peraturan karyawan rumah sakit			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
		Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

		Adanya perencanaan strategi bisnis rumah sakit			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

		Adanya perencanaan pengembangan SDM			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
		Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Pelaksana rencana pengembangan SDM			≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	-	-	≥ 90%	≥ 90%	
		Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap			≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	100%	-	-	≤ 2 jam	100%	
		Cost Recovery			≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	100%	100%	100%	≥ 60%	100%	

		Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Karyawan mndapat pelatihan minimal 20 jam pertahun			≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	100%	5,62%	-	≥ 60%	100%	
		Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan waktu			100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	BIDANG	INDIKATOR SPM	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET				REALISASI		PROYEKSI		
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
21	PELAYANAN REKAM MEDIK	Pemberi pelayanan Rekam Medik			Sesu ai pers yara tan	Sesua i persy arata n	Sesuai persyar atan	Sesuai persyar atan	50%	50%	Sesua i persy arata n	Sesua i persy arata n	
		Waktu penyediaan dokumen Rekam medik rawat jalan			≤ 10 meni t	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	5,59 Menit	-	≤ 10 menit	≤ 10 menit	
		Waktu penyediaan rekam medik pelayanan rawat inap			≤ 15 meni t	≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	7,17 Menit	-	≤ 15 menit	≤ 15 menit	

		Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan			100 %	100%	100%	100%	66%	-	100%	100%	
		Kelengkapan *Informed Concent* setelah mendapatkan informasi yang jelas			100 %	100%	100%	100%	70%	-	100%	100%	
		Kepuasan Pelanggan			≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	82,39%	-	≥ 80%	≥ 80%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Kinerja RSUD Dayaku Raja secara umum bisa dikatakan baik, dengan memperhatikan indikator pencapaian sasaran kinerja Renstra maupun kinerja SPM, yang sekaligus merupakan indikator keberhasilan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

RSUD Dayaku Raja adalah rumah sakit tipe D yang sedang berkembang sehingga masih diperlukan peningkatan dan penataan, baik system maupun sarana prasarananya. Pengembangan yang dilakukan saat ini berfokus pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang kesehatan dan peningkatan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan. Jika dilihat dari perkembangan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dimana banyak bermunculan perusahaan-perusahaan pertambangan, menuntut rumah sakit mampu menyediakan pelayanan yang berorientasi terhadap kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, maupun penyakit akibat kerja. Dari hasil identifikasi permasalahan yang ada di RSUD Dayaku Raja, maka ada beberapa yang berpengaruh terhadap kinerja RSUD Dayaku Raja, meliputi :

1. Upaya Pencapaian Standar Pelayanan Minimal melalui evaluasi kepuasan pasien terkait dengan respon time pelayanan.
2. Terbatasnya peralatan rumah sakit. Dengan adanya renovasi gedung- gedung pelayanan dikarenakan adanya perubahan dari rumah sakit tanpa kelas menjadi rumah sakit yang terbagi menjadi beberapa kelas di RSUD Dayaku Raja terdapat beberapa peralatan yang harus di penuhi, termasuk juga penggantian peralatan yang rusak.
3. Belum standarnya jumlah SDM Pelayanan Rumah Sakit. Terutama tentang ketersediaan dokter specialis yang merupakan standar rumah sakit tipe D.

untuk itu perlu melakukan kerjasama dokter spesialis, pemberian insentif yang besar, dan memenuhi fasilitas pendukungnya.

4. RSUD Dayaku Raja pada tahun 2024 melaksanakan pengembangan Gedung rumah sakit, yang dipersiapkan untuk menjadi Rumah Sakit Tipe C dan dapat memenuhi kebutuhan pelayanan Kesehatan di wilayah hulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. RSUD Dayaku Raja sebagai rumah sakit rujukan dari 8 kecamatan diwilayah hulu kabupaten kutai kartanegara saat ini memiliki ruang perawatan yang belum sesuai dengan standar dari Kementrian Kesehatan, serta alat kesehatan dan sumber daya manusia yang kurang memadai.
6. Perubahan status RSUD Dayaku Raja dari OPD menjadi UOBK dibawah koordinasi Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara dalam tahap melengkapi baik dari segi SDM, sarana dan prasarana, perangkat manajemen sehingga membutuhkan alokasi dana untuk pendidikan dan pelatihan, peralatan kesehatan, dan bangunan yang cukup tinggi.
7. Rendahnya kemampuan Rumah Sakit dalam upaya optimalisasi kerjasama dengan BPJS kesehatan dikarenakan minimnya sumber daya rumah sakit, terutama ketersediaan SDM Kesehatan Dokter Spesialis.
8. Upaya dari rumah sakit yang harus memenuhi standarisasi rumah sakit yang sudah terakreditasi, maka banyak memerlukan perubahan-perubahan ruangan, kelengkapan fasilitas dan alat kesehatan, ketersediaan sumber daya manusia yang telah memiliki sertifkasi, serta alur standar pelayanan minimal yang sesuai.

Selain itu sehubungan dengan isu-isu penting yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik bidang

kesehatan rujukan, beberapa tema isu strategis dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Persepsi seluruh pegawai terhadap tuntutan budaya akreditasi.
2. Kompetensi dan keterampilan (Soft Skill dan Hard Skill) SDM Kesehatan dan SDM Manajemen.
3. Pengembangan layanan dan pengembangan jejaring kemitraan strategis.
4. Rencana BPJS Kesehatan mengenai penerapan kelas standar BPJS Kesehatan, yaitu rawat inap kelas standar dalam program BPJS Kesehatan ini nantinya akan menghapus system kelas 1, 2, dan 3 sehingga kelas standar hanya akan terbagi menjadi dua criteria yakni, kelas peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan kelas untuk peserta Non-PBI. Hal ini membuat perubahan besar dalam tata kelola pelayanan rumah sakit.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tahap awal rancangan yang telah disusun pada RSUD Dayaku Raja Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalami penyesuaian dengan perencanaan kinerja RSUD Dayaku Raja Kabupaten Kutai Kartanegara. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

RSUD Dayaku Raja kabupaten Kutai Kartanegara, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi RSUD Dayaku Raja Kabupaten Kutai Kartanegara. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program,kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan pada RSUD Dayaku Raja Kabupaten Kutai Kartanegara .

Dalam pengajuan Jumlah Pagu Anggaran yang dituangkan dalam RKPD belum merupakan Pagu Final melainkan masih bersifat sementara atau indikatif, hal ini ditetapkan dan disetujui dan sangat

tergantung akan kondisi keuangan daerah, sehingga PD harus benar-benar memprioritaskan program kegiatan untuk tahun 2025.

Maka untuk merespon isu-isu strategis yang telah teridentifikasi, dituangkan dalam review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025, yang tertuang dalam Sub Kegiatan pada Tabel TC- 31.

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten KutaiKartanegara

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80 (BB) Nilai	46.448.785.983	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80 (BB) Nilai	75.774.966.202	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	*Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	24 Dokumen	250.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	*Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	24 Dokumen	-	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	-	

2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokumen	50.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokumen	-	
3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Dokumen	50.000.000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Dokumen	-	
II		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	*Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel*	1	Laporan	4.181.271.953		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	*Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel*	1	Laporan	206.271.953	
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Bulan ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	12	Bulan	4.000.000.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Bulan ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan			-	
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	181.271.953		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	181.271.953	

							Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Laporan	25.000.000
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	*Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah*	1	Dokumen	50.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	*Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah*	1	Dokumen	60.000.000
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	RSUD Dayaku Raja	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	1	Laporan	50.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	RSUD Dayaku Raja	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	1	Laporan	50.000.000
							Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	10.000.000
IV	Administrasi Kepegawaain Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	*Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	80	Orang	300.000.000	Administrasi Kepegawaain Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	*Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	80	Orang	50.000.000
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Pegawai yang mendaptakan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50	Orang	250.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Pegawai yang mendaptakan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Orang	-

2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25	Orang	50.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25	Orang	50.000.000
							Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja				20.000.000
							Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	10.000.000
							Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	10.000.000
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	7	Layanan	1.287.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	7	Layanan	1.287.500.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	11	Jenis	100.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	11	Jenis	100.000.000

2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Jenis	200.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Jenis	200.000.000	
3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	30	Jenis	300.000.000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	30 Jenis	300.000.000	
4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Orang yang di sediakan Makan Minum	5.000	Orang	150.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Orang yang di sediakan Makan Minum	5.000 Orang	150.000.000	
5		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Waktu Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	kali	290.000.000		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Waktu Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 kali	290.000.000	
6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Orang yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Orang	135.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Orang yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Orang	135.000.000	
7		Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	1	Berkas	112.500.000		Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	1 Berkas	112.500.000	

VI		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD Dayaku Raja	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	2.000.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD Dayaku Raja	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	12.000.000.000	
1		Pengadaan Mabel	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Jenis Mebel yang di sediakan		Unit	-	Pengadaan Mabel	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Jenis Mebel yang di sediakan	500	Unit	10.000.000.000	Pengadaan Mebel di maksudkan untuk melengkapi mebuelair 4 gedung RS yang baru di bangun pada

2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disedikan	1	Bangunan/ Gedung	1.000.000.000
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disedikan	100	Meter Persegi	1.000.000.000
VII	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		***Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan***	**12**	**Bulan**	**23.780.014.030**
1	Penyediaan Jasa surat Menyurat	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Waktu Ketersediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	9.750.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	RSUD Dayaku Raja	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	1.000.000.000

						tahun 2024 (C
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disedikan	1	Bangunan/Gedung	1.000.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disedikan	500	Meter Persegi	1.000.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan***	**12**	**Bulan**	**23.780.014.030**	
Penyediaan Jasa surat Menyurat	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Waktu Ketersediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	9.750.000	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	RSUD Dayaku Raja	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	1.000.000.000	

3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSUD Dayaku Raja	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	200.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSUD Dayaku Raja	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	200.000.000	
4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD Dayaku Raja	1.Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS 3. Penyediaan Jasa Keamanan	12	Bulan	22.570.264.030		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD Dayaku Raja	1.Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS 3. Penyediaan Jasa Keamanan	12	Bulan	22.570.264.030	
VIII		Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Barang Milik Daerah	58	Unit	2.600.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Barang Milik Daerah	58	Unit	2.600.000.000	
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	5	Unit	100.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	5	Unit	100.000.000	

2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya	16 Unit	600.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya	16 Unit	600.000.000	
		Operasional Atau Lapangan		Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan						Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan			
3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12 kali	1.200.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12 kali	1.200.000.000	
4		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	13 unit	200.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	13 unit	200.000.000	
5		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	12 kali	500.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	12 kali	500.000.000	
IX		Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD Dayaku Raja	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD RSUD	Nila i 1	12.000.000.000		Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD Dayaku Raja	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD RSUD	1 Nilai	35.771.180.219	

1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Dayaku Raja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	5	Unit Kerj a	12.000.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Dayak u Raja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	5	Unit Kerja	35.771.180.219	Berdasarkan Pendapatan TA. 2023 Rp. 21.388.079.652,07, diperlukan untuk pembayaran honorarium insentif/ jasa layanan spesialistik dasar dan
														tenaga medis lainnya
B		PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T	RSUD Dayaku Raja	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal(SPM) RS	85	Pers en	14.470.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Dayak u Raja	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal(SPM) RS	85	Persen	94.820.000.000	
I		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	RSUD Dayaku Raja	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Sesuai Standar	70	Pers en	11.100.000.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	RSUD Dayak u Raja	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Sesuai Standar	70	Persen	93.720.000.000	

1		Pembanguna n Fasilitas Kesehatan Lainnya	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1	Unit	500.000.000	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	RSUD Dayak u Raja	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1	Unit	2.000.000.000	Dibutuhkan 1 Unit Water Tank untuk penyimpana n pesediaan air bersih RSUD Dayaku Raja
1		Pembanguna n Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Rumah Dinas Dokter Spesialis yang Dibangun	3	Unit	1.000.000.000	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	RSUD Dayak u Raja	Jumlah Rumah Dinas Dokter Spesialis yang Dibangun	3	Unit	1.000.000.000	

	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1	Unit	500.000.000	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1	Unit	500.000.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1	Unit	200.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1	Unit	200.000.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1	Unit	250.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1	Unit	450.000.000	

	3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik, Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	5	Bangunan/ Gedung	1.000.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	6	Unit	51.000.000.000	Adanya penambahan ruang gedung setelah pembangunan RS Tahun 2024, berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah tempat tidur pasien sebanyak 151 TT dan memerlukan Alkes untuk menunjang Pelayanan Darurat, Layanan Hemodialisa, Layanan Intensive Care, Bedah Sentral, KRIS BPJS Kesehatan Kebidanan dan Rawat Inap
	4	Pengembangan Rumah Sakit Pelayanan Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	Gedung	1.350.000.000	Pengembangan Rumah Sakit Pelayanan Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	Gedung	30.000.000.000	Dibutuhkan lanjutan pengembangan RS untuk Renovasi Gedung C (Kelinik) dan Renovasi Gedung D (Ulin) (Termasuk Pengawasan /Manajemen Konstruksi)
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	7	Jenis	5.500.000.000	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	7	Jenis	7.770.000.000	Penambahan belanja bahan makan minum pasien karena penggabungan nomenklatur sub kegiatan (Kepmen 050 5889)

11		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	12	Unit	800.000.000	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	12	Unit	800.000.000	
II		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Pelayanan Rumah Sakit yang sesuai standar	75	Persen	3.270.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a		Pelayanan Rumah Sakit yang sesuai standar	75	Persen	1.000.000.000	
1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	RSUD Dayaku Raja	Jumlah waktu penyediaan Bahan Makan Minum Pasien	12	Bulan	2.270.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	RSUD Dayaku Raja	Jumlah waktu penyediaan Bahan Makan Minum Pasien	12	Bulan	-	Pagu Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di pindah ke sub kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah waktu Pemeriksaan dan Pemusnahan Limbah B3	12	Bulan	800.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah waktu Pemeriksaan dan Pemusnahan Limbah B3	12	Bulan	800.000.000	
3	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	RSUD Dayaku Raja	Sertifikat Akreditasi RS	1	Dokumen	200.000.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	RSUD Dayaku Raja	Sertifikat Akreditasi RS	1	Dokumen	200.000.000	
III	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	RSUD Dayaku Raja	Tersedia dan Terselenggaranya Sistem Infomasi Kesehatan Secara Terintegrasi	80	Persen	100.000.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	RSUD Dayaku Raja	Tersedia dan Terselenggaranya Sistem Infomasi Kesehatan Secara Terintegrasi	80	Persen	100.000.000	
1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Peralatan SIM RS yang tersedia	1	Kegiatan	100.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Peralatan SIM RS yang tersedia	1	Kegiatan	100.000.000	
C	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Dayaku Raja	Persentase SDM yang Terlatih Sesuai Kompetensiny a	20	Persen	100.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Dayaku Raja	Persentase SDM yang Terlatih Sesuai Kompetensiny a	20	Persen	800.000.000	

II	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	RSUD Dayaku Raja	Persentase SDM yang Terlatih Sesuai Kompetensiny a	50	Persen	100.000.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	RSUD Dayaku Raja	Persentase SDM yang Terlatih Sesuai Kompetensiny a	50	Persen	800.000.000	
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Dayaku Raja	Jumlah tenaga kesehatan yg mengikuti pelatihan	50	Orang	100.000.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Dayaku Raja	Jumlah tenaga kesehatan yg mengikuti pelatihan	50	Orang	800.000.000	Dibutuhkan peningkatan kapasitas petugas RSUD Dayaku Raja untuk menunjang layanan RS yang akan ditingkatkan kompetensi sesuai tupoksi masing-masing berdasarkan Training Need Assesment (TNA)
D	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKA T BIDANG KESEHATAN	RSUD Dayaku Raja	Persentase Penggalangan Kerjasama RS dengan pihak ke tiga	100	Persen	2.500.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	RSUD Dayaku Raja	Persentase Penggalangan Kerjasama RS dengan pihak ke tiga	100	Persen	2.500.000.000	

I	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Jenis Kerjasama Rumah Sakit dengan Pihak Ketiga	1	Jenis	2.500.000.000		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Jenis Kerjasama Rumah Sakit dengan Pihak Ketiga	1 Jenis	2.500.000.000	
1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Kerjasama RS dengan dokter spesialis/residen	2	Dokumen	2.500.000.000		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Kerjasama RS dengan dokter spesialis/residen	2 Dokumen	2.500.000.000	
Total						63.518.785.983				Total		173.894.966.202	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini tidak ada terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan di RSUD Dayaku Raja. Dari hasil musrenbang yang telah dilaksanakan tidak ada usulan program atau kegiatan masyarakat dari pemangku kepentingan di Tahun 2025 yang langsung tertuju pada PD RSUD Dayaku Raja.

Tabel T-C. 32. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RSUD Dayaku Raja Kabupaten Kutai Kartanegara seharusnya mampu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam menjalankan beberapa kebijakan termasuk kebijakan nasional mengenai kesehatan. Arah kebijakan dan strategi yang telah dilakukan oleh RSUD Dayaku Raja Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada permasalahan dan mempertimbangkan tantangan kedepan. Pada dasarnya RSUD Dayaku Raja Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan apa yang menjadi kebijakan nasional dibidang kesehatan dan melaksanakan apa yang menjadi sasaran strategis Kementrian Kesehatan, salah satu contoh misalnya menekan angka kematian ibu dan bayi, pengobatan pasien TB, dan program Suistanable Development Goals (SDG's) dan melayani peserta JKN, kemudian dari pada itu RSUD Dayaku Raja Kabupaten Kutai Kartanegara juga harus mampu menterjemahkan sasaran-sasaran strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim kedalam Program dan kegiatan di RSUD Dayaku Raja Kabupaten Kutai Kartanegara agar tujuan yang lebih besar dapat

dicapai secara bersama-sama.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran merupakan target kualitatif yang dalam penetapannya mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tingkat pencapaian tujuan dan

sasaran merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan kepemerintahan (*performance indikator*). Tujuan dan sasaran dapat menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai kedepan untuk lebih mempertajam focus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua program dan kegiatan.

Untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja Tahun 2025 didasarkan pada rumusan strategis penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra RSUD Dayaku Raja 2021-2026. Tujuan Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja Tahun 2025 yaitu, "*Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja ".* Sedangkan Sasaran Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja Tahun 2025 yaitu, "*Peningkatan Kinerja Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja".*

Dalam penetapan Tujuan dan sasaran juga dirancang dan diidentifikasikan indikator pencapaiannya, yaitu suatu ukuran tingkat keberhasilan perwujudan pencapaian pada periode tahun tertentu. Dimana setiap indikator pencapaian tujuan dan sasaran disertai dengan targetnya masing-masing.

Selanjutnya penetapan indikator tujuan dan sasaran RSUD Dayaku Raja Kabupaten Kutai Kartanegara secara menyeluruh, diharapkan dapat memberikan fokus dalam penentuan strategi dan prioritas sehingga seluruh kebijakkan dan program pilihan yang akan dilaksanakan guna mencapai visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Rencana Kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas Perangkat Daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Program dan Kegiatan

Rancangan Akhir Renja RSUD Dayaku Raja tahun 2025 akan direncanakan 4 program dan 14 kegiatan dengan total belanja sebesar *Rp. 173.894.966.202,00* dengan uraian sebagai berikut :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja Tahun 2025 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
2. Mempedomani RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Klartanegara Tahun 2021-2026 Mempedomani Rencana Strategis RSUD Dayaku Raja Tahun 2021- 2026 dimana kemudian dilakukan penyesuaiannya didalam dokumen Rencana Kerja (RENJA) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis RSUD Dayaku Raja berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun

sebelumnya

4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan
5. Mempertimbangkan pelaksanaan tugas dan fungsi internal RSUD Dayaku Raja yang dicerminkan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

b. Rekapitulasi Program

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Jumlah Program yang akan dilaksanakan RSUD Dayaku Raja Tahun 2025 sebanyak 4 (Empat) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapisitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan RSUD Dayaku Raja Tahun 2025 adalah sebanyak 14 (empat belas) kegiatan
3. Jumlah Sub Kegiatan akan dilaksanakan RSUD Dayaku Raja Tahun 2025 sebanyak 41 (empat puluh satu) Sub Kegiatan.
4. Jumlah Kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2025 sebesar *Rp. 173.894.966.202,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Rupiah)* yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara dan BLUD RSUD Dayaku Raja.

c. Rumusan Program dan Kegiatan memiliki beberapa sub kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD dikarenakan beberapa hal antara lain :

1. Adanya tambahan pagu anggaran pada beberapa sub kegiatan berdasarkan Analisa kebutuhan belanja dan hasil evaluasi tahun 2023

d. Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana kerja RSUD Dayaku Raja 2025 disertai indikator serta sumber pendanaan tersaji pada tabel TC. 33

Tabel -C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025(N)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026 (+N)		
			Lokasi Detail	Target capaian kinerja (%)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja (%)		Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	9	10	11		12
	PROGRAM									
	PENUNJANG									
1.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80 Nilai (BB)	75.774.966.202			75 (BB)	Nilai	45.628.521.953
	DAERAH									
	KABUPATEN/KOTA									
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	*Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		-	APBD		24	Dokumen	250.000.000
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	APBD		8	Dokumen	150.000.000
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhisar Realisasi Kinerja SKPD		-	APBD		4	Dokumen	50.000.000
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	APBD		12	Dokumen	50.000.000

1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	*Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel*	1	Laporan	206.271.953	APBD		1	Laporan	4.181.271.953
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Bulan ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan			-	APBD		12	Bulan	4.000.000.000
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12	Laporan	181.271.953	APBD		12	Laporan	181.271.953
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	25.000.000	APBD				
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	*Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah*	1	Dokumen	60.000.000	APBD		1	Dokumen	50.000.000
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	RSUD Dayaku Raja	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	1	Laporan	50.000.000	APBD		1	Laporan	50.000.000
1.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	10.000.000					
1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja				20.000.000	APBD		80	Orang	300.000.000

1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	10.000.000	APBD		50	Orang	250.000.000
1.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	10.000.000	APBD		25	Orang	50.000.000
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaain Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	*Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	80	Orang	50.000.000	APBD		80	Orang	300.000.000
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Pegawai yang mendaptakan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-	APBD		50	Orang	250.000.000
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25	Orang	50.000.000	APBD		25	Orang	50.000.000
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD Dayaku Raja	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	7	Layanan	1.287.500.000	APBD		7	Layanan	1.237.500.000
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	Paket	100.000.000	APBD		11	Jenis	100.000.000

1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	200.000.000			1	Jenis	200.000.000
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30	Paket	300.000.000	APBD		30	Jenis	250.000.000
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5.000	Paket	150.000.000	APBD		5000	Orang	150.000.000
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	290.000.000	APBD		12	Kali	290.000.000
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Laporan	135.000.000	APBD		30	Orang	135.000.000
1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	112.500.000	APBD		1	Berkas	112.500.000
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD Dayaku Raja	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	12.000.000.000			100	Persen	2.000.000.000
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mabel	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	500	Unit	10.000.000.000	APBD		1	Bangunan /Gedung	1.000.000.000
1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1.000.000.000	APBD		1	Bangunan /Gedung	1.000.000.000

1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disedikan	100	Meter Persegi	1.000.000.000	APBD		100	Meter Persegi	1.000.000.000
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	12	Bulan	23.780.014.030	APBD		12	Bulan	23.009.750.000
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa surat Menyurat	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	9.750.000	APBD		12	Bulan	9.750.000
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	RSUD Dayaku Raja	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	1.000.000.000	APBD		12	Bulan	1.000.000.000
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSUD Dayaku Raja	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	200.000.000	APBD		12	Bulan	200.000.000
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD Dayaku Raja	1.Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS 3. Penyediaan Jasa Keamanan	12	Bulan	22.570.264.030	APBD		12	Bulan	21.800.000.000

1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Barang Milik Daerah	58	Unit	2.600.000.000	APBD		58	Unit	2.600.000.000
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Unit	100.000.000	APBD		5	Unit	100.000.000
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	16	Unit	600.000.000	APBD		16	Unit	600.000.000
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12	kali	1.200.000.000	APBD		12	Kali	1.200.000.000
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direha bilitasi	13	unit	200.000.000	APBD		13	Unit	200.000.000
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direha bilitasi	12	kali	500.000.000	APBD		12	Kali	500.000.000

1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD Dayaku Raja	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD RSUD	1	Nilai	35.771.180.219	BLUD		25000	Nilai	12.000.000.000
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Dayaku Raja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	35.771.180.219	BLUD	Berdasarkan Pendapatan TA. 2023 Rp. 21.388.079.652,07, diperlukan untuk pembayaran honorarium insentif/ jasa layanan spesialistik dasar dan tenaga medis lainnya	30000	Orang	12.000.000.000
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Dayaku Raja	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal(SPM) RS	85	Persen	94.820.000.000	APBD		87,5	Persen	15.890.000.000
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	RSUD Dayaku Raja	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Sesuai Standar	70	Persen	93.720.000.000	APBD		70	Persen	12.520.000.000
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1	Unit	2.000.000.000	APBD	Dibutuhkan 1 Unit Water Tank untuk penyimpana n pesediaan air bersih RSUD Dayaku Raja	1	Bangunan /Gedung	500.000.000
1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Rumah Dinas Dokter Spesialis yang Dibangun	3	Unit	1.000.000.000	APBD		3	Bangunan /Gedung	1.000.000.000

1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1	Unit	500.000.000	APBD		1	Bangunan /Gedung	500.000.000
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1	Unit	200.000.000	APBD		1	Ruangan	200.000.000
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1	Unit	450.000.000	APBD		1	Bangunan /Gedung	250.000.000
			Jumlah Rumah								
			sakit yang								
			ditingkatkan								
			sarana, prasarana,								
			alat kesehatan dan								
			SDM agar sesuai								
			standar jenis								
			pelayanan rumah								
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Dayaku Raja	sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi	1	Bangunan/ Gedung	30.000.000.000	APBD	Dibutuhkan lanjutan pengembang an RS untuk Gedung Poliklinik, Gedung B2 (Poli Kebidanan) dan Gedung F (Rawat Inap Kelas I)	1	Bangunan /Gedung	500.000.000
			rasio tempat tidur								
			terhadap jumlah								
			penduduk minimal								
			1:1000 dan/atau								

			dalam rangka								
			peningkatan								
			kapasitas pelayanan								
			rumah sakit								
								Adanya			
								penambahan			
								ruang			
								gedung			
								setelah			
								pembanguna			
								n RS Tahun			
								2024,			
								berbanding			
								lurus dengan			
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25	Unit	51.000.000.000	APBD	bertambahny a jumlah Tempat Tidur pasien sebanyak 151 TT dan	2	Bangunan /Gedung	1.000.000.000
								memerlukan			
								Alkes lainnya			
								untuk			
								menunjang			
								layanan			
								Gawat			
								Darurat,			
								Layanan			
								Hemodialisa,			
								Layanan			

								Intensive Care, Bedah Sentral, KRIS BPJS Kesehatan Kebidanan dan Rawat Inap			
1.02.02.2.01.0022	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	7	Jenis	7.770.000.000	APBD	Penambahan belanja bahan makan minum pasien karena penggabunga n nomenklatur sub kegiatan (Kepmen 050 5889)	5	Unit	7.770.000.000
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang	12	Unit	800.000.000	APBD		12	Bulan	800.000.000
			Terpelihara Sesuai Standar								
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pelayanan Rumah Sakit yang sesuai standar	75	Persen	1.000.000.000	APBD		75	Persen	3.270.000.000

1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12	Dokumen	-	APBD	Pagu Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di pindah ke sub kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	12	Bulan	2.270.000.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah waktu Pemeriksaan dan Pemusnahan Limbah B3	12	Bulan	800.000.000	APBD		12	Bulan	800.000.000
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1	Unit	200.000.000	APBD		1	Dokumen	200.000.000
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	RSUD Dayaku Raja	Tersedia dan Terselenggaranya Sistem Infomasi Kesehatan Secara Terintegrasi	80	Persen	100.000.000	APBD		85	Persen	100.000.000
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	Dokumen	100.000.000	APBD		1	Kegiatan	100.000.000
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Dayaku Raja	Persentase SDM yang Terlatih Sesuai Kompetensinya	20	Persen	800.000.000	APBD		20	Persen	100.000.000

1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Dayaku Raja	Persentase SDM yang Terlatih Sesuai Kompetensinya	50	Persen	800.000.000	APBD		50	Persen	100.000.000
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50	Orang	800.000.000	APBD	Dibutuhkan peningkatan kapasitas petugas RSUD Dayaku Raja untuk menunjang layanan RS yang akan ditingkatkan kompetensi sesuai tupoksi masing-masing berdasarkan Training Need Assesment (TNA)	50	Orang	100.000.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	RSUD Dayaku Raja	Persentase Penggalangan Kerjasama RS dengan pihak ke tiga	100	Persen	2.500.000.000	APBD		100	Persen	2.500.000.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Jenis Kerjasama Rumah Sakit dengan Pihak Ketiga	1	Jenis	2.500.000.000	APBD		2	Jenis	2.500.000.000
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	RSUD Dayaku Raja	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2	Dokumen	2.500.000.000	APBD		2	Dokumen	2.500.000.000
						173.894.966.202					64.118.521.953

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja Tahun 2025 merupakan hasil usaha para pemangku kepentingan dalam hal ini Unit Kerja Bidang dan Bagian. Rencana Kerja ini pun tidak luput dengan memperhatikan Rencana Strategis RSUD Dayaku Raja tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025. Penyusunan rancangan Rencana Kerja dapat tersusun hasil dari monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dari unit kerja di lingkungan RSUD Dayaku Raja.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025. Guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2025.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

5.1 Catatan dalam Penyusunan Rencana Kerja

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja Tahun 2025 antara lain :

a. Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam proses pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi misi RSUD Dayaku Raja.
b. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara
c. Penyusunan Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebagai komitmen untuk pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
d. Rencana Kerja Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah- langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, siknronisasi, sinergitas,

harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai upaya menjaga kesinambungan dan menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target perangkat daerah serta pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

a. Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja Tahun 2025 menjadi dasar dalam penyusunan RKA dan DPA RSUD Dayaku Raja Tahun Anggaran 2025
b. Penyusunan Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja Tahun 2025 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
c. Penyusunan Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
d. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja Tahun 2025

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program, kegiatan dan Sub kegiatan pada Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja Tahun 2025 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkag-langkah sebagai

berikut :

a. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja untuk setiap triwulannya
b. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja maka dokumen Rencana Kerja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku
c. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Rencana Kerja RSUD Dayaku Raja Tahun 2025
d. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
e. Seluruh Aparatur RSUD Dayaku Raja berkewajiban untuk melaksanakan program – program dan kegiatan – kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025.
f. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan Kegiatan RSUD Dayaku Raja, seluruh aparatur RSUD Dayaku Raja secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Rencana KerjaTahun 2025.

Akhirnya dengan mengucap syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa semoga kita selalu diberi Rahmat dan kekuatan untuk tetap dapat berkarya.

nn.RENJA KECAMATAN TENGGARONG

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya berupa dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tenggarong dipakai sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tenggarong yang selanjutnya akan dipakai sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Tenggarong. Muatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong Tahun 2025 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu, b) Rumusan status kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini, c) Rumusan peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan Renja, d) Rumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan, e) pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana, f) rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja, g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan, h) prakiraan maju pendanaan untuk tahun

berikutnya, i) kejelasan siapa yang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran. Melalu pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan kerangka berfikir yang komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan melalui a) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, b) kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur Pemerintah dan non pemerintah, c) keterwakilan yang mewadai dari seluruh segmen masyarakat terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal, d) berperan aktif pada pelaksanaan musrenbang RKPD dari segi penerapan perencanaan partisipatif, e)

Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan serta prioritas program.

Pendekatan politis, penyusunan Renja Kecamatan Tenggarong mengacu pada RKPD dan RPJMD yang merupakan bentuk konsekuensi politis antara Bupati/Wakil Bupati terpilih. Pendekatan ini juga tercermin pada keterlibatan aktif DPRD dalam musrenbang Kecamatan dan kabupaten termasuk hasil sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD, kemudian dokumen RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan sampai RAPBD.

Pendekatan top down, perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui rapat koordinasi dan musrenbang mulai tingkat nasional, provinsi dan kabupaten juga tujuan *globalMDGs*. Pendekatan ini tercermin pada a) sinergi dengan program prioritas nasionaldan daerah, b) konsisten pada RPJMD, RKPD dan Renstra Kecamatan Tenggarong, Konsisten dengan dokumen RTRW daerah, c) penanganan masalah dengan pendekatan holistic dan pendekatan sistem.

Pendekatan *bottom-up,* perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dan diselaraskan melalui musrenbang, konsisten terhadap visi misi RPJMD serta kesepakatan masyarakat tentang prioritas pembangunan dan hasil forum SKPD.

Penyusunan Renja ini disesuaikan dengan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja ini memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kecamatan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9 Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10 Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

14 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

15 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

16 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tenggarong.
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Tenggarong.
3. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan kecamatan Tenggarong Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.
4. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan.

5. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya. Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Tenggarong dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daeah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Recana Kerja (Renja) Kecamatan Tenggarong Tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan Visi Kukar Idaman yaitu “MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BAHAGIA”. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Tenggarong telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya dan telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu:

a. Menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.
b. Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, pelaksanaan kinerja Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan Perangkat Daerah dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini : *(Tabel T-C 29)*

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Tenggarong

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra- PD s/d tahun berjalan (2024)	
											Target Renja-PD tahun (2023)		Realisasi Renja-PD tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1					Urusan													
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	357	Nilai	65	Nilai	67	Nilai	68,6	Nilai	102%	70	203,6	57%
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	35	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	100%	7	21	60%

						Daerah												
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	6	60%
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	470	Dokumen	113	Dokumen	94	Dokumen	138	Dokumen	147%	94	345	73%
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	75	Laporan	15	Laporan	15	Laporan	15	Laporan	100%	15	45	60%

						Kinerja SKPD												
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	36	60%
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	180	Laporan	36	Laporan	36	Laporan	36	Laporan	100%	36	108	60%
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1750	Orang/bulan	350	Orang/bulan	350	Orang/bulan	350	Orang/bulan	100%	350	1050	60%
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	10	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100%	2	6	60%

						Keuangan Akhir Tahun SKPD												
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	36	60%
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	5	unit	1	unit	1	unit	1	unit	100%	1	3	60%
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	3	60%

						Barang Milik Daerah pada SKPD												
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	76	orang	0	orang	19	orang	19	orang	100%	19	38	50%
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	76	Paket	0	Paket	19	Paket	19	Paket	100%	19	38	50%
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	35	Layanan	7	Layanan	7	Layanan	7	Layanan	100%	7	21	60%
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	65	Paket	13	Paket	13	Paket	13	Paket	100%	13	39	60%
7	01	01	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan	125	Paket	25	Paket	25	Paket	25	Paket	100%	25	75	60%

			6		Kantor	dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan												
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	Paket	0	Paket	5	Paket	5	Paket	100%	5	10	50%
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	365	Paket	73	Paket	73	Paket	73	Paket	100%	73	219	60%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	Paket	3	Paket	3	Paket	3	Paket	100%	3	9	60%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	100%	5	15	60%
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	3	9	60%

7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	480	Unit	96	Unit	96	Unit	96	Unit	100%	96	288	60%
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	30	Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	100%	6	18	60%
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	0	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	2	50%
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	0	Unit	5	Unit	5	Unit	100%	5	10	50%
7	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	3	60%
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang	60	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	36	60%

						Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan												
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	3	60%
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	400	Laporan	80	Laporan	80	Laporan	80	Laporan	100%	80	240	60%
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	36	60%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1030	Laporan	206	Laporan	206	Laporan	206	Laporan	100%	206	618	60%

7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	175	Unit	35	Unit	35	Unit	35	Unit	100%	35	105	60%
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	175	Unit	35	Unit	35	Unit	35	Unit	100%	35	105	60%
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	175	Unit	35	Unit	35	Unit	35	Unit	100%	35	105	60%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	28	Unit	0	Unit	7	Unit	7	Unit	100%	7	14	50%

						Lainnya yang Dipelihara												
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	Unit	0	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	2	50%
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	0	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	2	50%
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	400	Persen	80	Persen	80	Persen	80	Persen	100%	80	240	60%
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	10	Kegiatan	2	Kegiatan	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100%	2	6	60%

7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	60	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	36	60%
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	3	60%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	500	Presen	100	Presen	100	Presen	100	Presen	100%	100	300	60%
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	180	Kegiatan	36	Kegiatan	36	Kegiatan	36	Kegiatan	100%	36	108	60%
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	4	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	2	50%

						Kecamatan												
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	120	Kegiatan	24	Kegiatan	24	Kegiatan	24	Kegiatan	100%	24	72	60%
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4125	Lembaga Kemasyarakatan	825	Lembaga Kemasyarakat an	825	Lembaga Kemasyarakat an	825	Lembaga Kemasyarakatan	100%	825	2475	60%
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	500	Unit	100	Unit	100	Unit	100	Unit	100%	100	300	60%
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	2120	Pokmas / Ormas	424	Pokmas / Ormas	424	Pokmas / Ormas	424	Pokmas / Ormas	100%	424	1272	60%

						Masyarakat di Kelurahan												
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1440	Lembaga	288	Lembaga	288	Lembaga	288	Lembaga	100%	288	864	60%
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6640	Lembaga Kemasyarakatan	1328	Lembaga Kemasyarakat an	1328	Lembaga Kemasyarakat an	1328	Lembaga Kemasyarakatan	100%	1328	3984	60%
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1200	Lembaga Kemasyarakatan	240	Lembaga Kemasyarakat an	240	Lembaga Kemasyarakat an	240	Lembaga Kemasyarakatan	100%	240	720	60%
7	01	03	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	60	Unit	12	Unit	12	Unit	12	Unit	100%	12	36	60%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintaha	500	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	300	60%

					DESA	n Desa Dalam Kategori Baik												
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	10	Desa	2	Desa	2	Desa	2	Desa	100%	2	6	60%
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	2	50%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat program dan kegiatan yang melebihi target, terdapat beberapa program dan kegiatan yang memenuhi target dan beberapa program dan kegiatan yang tidak memenuhi target. Adapun program dan kegiatan yang tidak memenuhi target disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

1. Perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Nilai pada APBD lebih kecil dari nilai pada Renja.

Hal-hal yang diambil dalam mengatasi hal-hal tersebut adalah:

1. Melakukan pergeseran anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan.
2. Mengurangi dan menghapus beberapa kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagaian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Tenggarong, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Tenggarong dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Administrasi baik kedalam maupun keluar.
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat.
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.
5. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat.

Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tenggarong selama kurun waktu tahun 2022 - 2026 cukup memuaskan. Terdapat 3 (Tiga) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Tenggarong, yaitu :(*Tabel T-C 30)*

Nama SKPD : KECAMATAN TENGGARONG

Tabel T-C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	INDIKATOR	NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		ANALISIS
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	-		75	75	80	80	85	-	80,17	79,06	80	80	-
2	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	-		70	68	65	60	50	100	100	100	65	60	-
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-		75	76	78	79	80	-	68,6	-	78	79	-

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah di Kecamatan di Pimpin oleh seorang Camat yang dalam Pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selaku pelayanan publik Camat juga menerima tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang di limpahkan oleh Bupati, menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Sebagaimana yang dimaksud diatas Kecamatan juga merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati/Walikota. Sedangkan fungsi Kecamatan sebagai berikut :

1. Menyusun Program dan Rencana Kegiatan Kecamatan.
2. Melakukan Koordinasi dengan seluruh Kelurahan dan Desa dalam menyusun Rencana Pembangunan, Pelaksanaan Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Kemasyarakatan.
3. Melaksanakan Pelayanan Terpadu (PATEN) yang akan mempermudah Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Tenggarong.
4. Melakukan Pembinaan terhadap Kelembagaan Masyarakat seperti, Lembaga Adat, Posyandu,Karang Taruna, PKK, RT, LPM, dan Linmas.
5. Meningkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Kader Posyandu dan meningkatkan kemampuan Anggota Linmas dengan mengadakan Pelatihan.

Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Tenggarong dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik

I. Permasalahan dan hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan:

- Kurangnya koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan
- Mekanisme dan pola kerja yang belum tertata secara sistematis

- Kurangnya koordinasi dengan stakeholder terkait
- Pemahaman masyarakat tentang dokumen adminitrasi kependudukan dan standar operasional pelayanan masih minim
- Kapasitas aparatur pemerintah belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas
- Lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah
- Pola pembinaan aparatur yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja
- Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat

II. Tantangan dan Peluang

Kecamatan Tenggarong masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan kedepan sebagai Pusat Kegiatan wilayah (PKW), terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang lengkap dan belum memadai;
2. Sistem kerja yang belum optimal;
3. Sumber daya manusia yang belum optimal;
4. Kapasitas kelembagaan kelurahan belum optimal; dan
5. Peningkatan Infrastruktur masih kurang dan belum merata.

Sedangkan Peluang dalam melaksanakan pelayanan di kecamatan Tenggarong, antara lain:

1. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
2. Membenahi sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
3. Melaksanakan dan mengikuti pelatihan dalam pelayanan publik sehingga terjadi peningkatan pengetahuan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

III. Isu strategis

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tenggaron, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat di wilayah kecamatan harus terus dipacu dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah

guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Profesionalitas pelayanan kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur karena keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.
4. Mengoptimalkan pola koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pelayanan melalui multi stakeholder yang ada di wilayah kecamatan
5. Melakukan Sosialisasi Kepada warga Kelurahan dan Desa tentang pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan serta dokumen-dokumen lainnya yang memang harus dimiliki oleh warga.
6. Mengundang pihak perusahaan yang ada diwilayah Kecamatan Tenggarong dalam kegiatan Musrenbang Kelurahan dan Desa serta Musrenbang Kecamatan dalam rangka melakukan singkronisasi rencana Program Kegiatan yang ada di Kelurahan dan Desa yang dapat dibantu oleh pihak perusahaan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2025 review Rancangan Akhir RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai Lampiran.*(Tabel T-C 31)*

TABEL T.C-31

Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Rancangan Awal (RANWAL) RKPD 2025						Hasil Analisa Kebutuhan 2025						Catatan Penting
	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Target		Pagu Indikatif Rp.	
KECAMATAN TENGGARONG						91.922.790.520						80.660.481.032	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	TENGGARONG	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	42.369.176.899	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	TENGGARONG	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	51.561.558.036	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TENGGARONG	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	7	230.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TENGGARONG	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	7	605.000.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TENGGARONG	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7	125.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TENGGARONG	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	140.000.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	TENGGARONG	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	2	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	TENGGARONG	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	2	5.000.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	TENGGARONG	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	dokumen	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	TENGGARONG	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	dokumen	2	5.000.000	Tambahan untuk Penyusunan Dokumen

	Perubahan RKA-SKPD		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Perubahan RKA-SKPD		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Perubahan RKA-SKPD
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TENGGARONG	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TENGGARONG	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1	70.000.000	Tambahan untuk Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TENGGARONG	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	12	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TENGGARONG	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	12	60.000.000	Tambahan untuk Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	TENGGARONG	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	data	0	0	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	TENGGARONG	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	data	200	300.000.000	Tambahan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
7.01.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TENGGARONG	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	0	0	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TENGGARONG	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	25	25.000.000	Tambahan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TENGGARONG	Jumlah laporan Administrasi Keuangan	laporan	36	35.760.526.292	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TENGGARONG	Jumlah laporan Administrasi Keuangan	laporan	36	43.508.730.429	

			Perangkat Daerah yang akuntabel						Perangkat Daerah yang akuntabel				
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TENGGARONG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	350	34.831.839.008	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TENGGARONG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	350	42.580.043.145	Menyesuaikan pagu tahun 2024
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	TENGGARONG	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	TENGGARONG	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	25.000.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	TENGGARONG	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	878.687.284	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	TENGGARONG	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	878.687.284	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	TENGGARONG	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	0	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	TENGGARONG	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	1	25.000.000	Tambahan untuk Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	TENGGARONG	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	unit	1	51.604.584	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	TENGGARONG	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	unit	1	276.604.584	

7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	TENGGARONG	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	TENGGARONG	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	25.000.000	
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	TENGGARONG	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	TENGGARONG	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	150.000.000	
7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	TENGGARONG	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	0	0	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	TENGGARONG	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	50.000.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	TENGGARONG	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	51.604.584	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	TENGGARONG	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	51.604.584	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	TENGGARONG	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	orang	1	20.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	TENGGARONG	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	orang	1	20.000.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	TENGGARONG	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	20.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	TENGGARONG	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	20.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	TENGGARONG	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	856.171.405	Administrasi Umum Perangkat Daerah	TENGGARONG	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	1.400.348.405	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi	TENGGARONG	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Paket	13	52.999.994	Penyediaan Komponen Instalasi	TENGGARONG	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Paket	13	52.999.994	

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TENGGARONG	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	239.135.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TENGGARONG	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	239.135.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	TENGGARONG	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	8.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	TENGGARONG	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	8.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	TENGGARONG	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	73	185.429.457	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	TENGGARONG	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	73	516.019.457	Tambahan untuk pengadaan bahan logistik Kantor Camat Tenggarong
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	TENGGARONG	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	84.193.954	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	TENGGARONG	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	84.193.954	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TENGGARONG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	136.413.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TENGGARONG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	350.000.000	Tambahan untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	TENGGARONG	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	150.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	TENGGARONG	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	150.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	TENGGARONG	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit	12	543.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	TENGGARONG	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit	12	543.000.000	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	TENGGARONG	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Unit	6	180.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	TENGGARONG	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Unit	6	180.000.000	

			Dinas Jabatan yang Disediakan						Dinas Jabatan yang Disediakan				
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	TENGGARONG	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	10.000.000	Pengadaan Mebel	TENGGARONG	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	10.000.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TENGGARONG	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	203.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TENGGARONG	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	203.000.000	
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	TENGGARONG	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	12	150.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	TENGGARONG	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	12	150.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TENGGARONG	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12	4.285.639.914	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TENGGARONG	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12	4.285.639.914	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	TENGGARONG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	4.510.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	TENGGARONG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	4.510.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TENGGARONG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	720.317.280	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TENGGARONG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	720.317.280	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TENGGARONG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	20.068.998	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TENGGARONG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	20.068.998	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TENGGARONG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	206	3.540.743.636	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TENGGARONG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	206	3.540.743.636	

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TENGGARONG	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	35	622.234.704	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TENGGARONG	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	35	922.234.704	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	TENGGARONG	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	16	84.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	TENGGARONG	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	16	84.400.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TENGGARONG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	16	38.834.704	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TENGGARONG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	16	338.834.704	Tambahan utk Kec. Tgr, karena ada tambahan kendaraan
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TENGGARONG	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	7	86.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TENGGARONG	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	7	86.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	TENGGARONG	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	375.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	TENGGARONG	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	375.000.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	TENGGARONG	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	38.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	TENGGARONG	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	38.000.000	

7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	TENGGARONG	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persentase	80	41.285.999.848	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	TENGGARONG	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persentase	80	14.070.000.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	TENGGARONG	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	0	0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	TENGGARONG	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	2	450.000.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	TENGGARONG	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	0	0	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	TENGGARONG	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	2	150.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	TENGGARONG	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	0	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	TENGGARONG	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	300.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	TENGGARONG	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	SPM	0	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	TENGGARONG	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	SPM	1	50.000.000	

7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	TENGGARONG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	TENGGARONG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	50.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	TENGGARONG	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	41.285.999.848	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	TENGGARONG	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	13.570.000.000	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	TENGGARONG	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	12	205.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	TENGGARONG	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	0	0	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	TENGGARONG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	0	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	TENGGARONG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	220.000.000	Tambahan PATEN dan PPID
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	TENGGARONG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	41.080.999.848	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	TENGGARONG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	60	13.350.000.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	TENGGARONG	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	8.187.613.773	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	TENGGARONG	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	14.613.922.996	

7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	TENGGARONG	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	36	35.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	TENGGARONG	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	0	0	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	TENGGARONG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	35.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	TENGGARONG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	TENGGARONG	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	24	208.499.946	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	TENGGARONG	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	24	1.572.000.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	TENGGARONG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	12	58.499.946	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	TENGGARONG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	12	100.000.000	Tambahan untuk Kegiatan Muisrenbang Kecamatan Tenggarong
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	TENGGARONG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	0	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	TENGGARONG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	450.000.000	Tambahan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	TENGGARONG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	332	150.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	TENGGARONG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	12	972.000.000	Di limpahkan ke 12 kelurahan
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	TENGGARONG	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	0	0	Evaluasi Kelurahan	TENGGARONG	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	2	50.000.000	Di limpahkan ke 12 kelurahan
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	TENGGARONG	Jumlah Pemberdayaan Lembaga	Lembaga	288	7.944.113.827	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	TENGGARONG	Jumlah Pemberdayaan Lembaga	Lembaga	288	13.041.922.996	

	Tingkat Kecamatan		Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				Tingkat Kecamatan		Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	TENGGARONG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1045	7.740.190.831	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	TENGGARONG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1045	12.838.000.000	1. Fasilitasi Perangkat RT2. Fasilitasi LPM3. Fasilitasi Lembaga Adat4. Fasilitasi Posyandu Balita dan Lansia5. Fasilitasi Linmas6. Fasilitasi Pramuka7. Fasilitasi PKK dan HKG
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	TENGGARONG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	240	103.922.996	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	TENGGARONG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	12	103.922.996	
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	TENGGARONG	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	12	100.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	TENGGARONG	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	12	100.000.000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	TENGGARONG	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persentase	0	0	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	TENGGARONG	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persentase	80	175.000.000	

7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	TENGGARONG	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	0	0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	TENGGARONG	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	2	175.000.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	TENGGARONG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	0	0	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	TENGGARONG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2	175.000.000	Tambahan untuk Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	TENGGARONG	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase	0	0	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	TENGGARONG	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase	80	240.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	TENGGARONG	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	0	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	TENGGARONG	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	2	240.000.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	TENGGARONG	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	0	0	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	TENGGARONG	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	140	240.000.000	Tambahan untuk Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	TENGGARONG	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja	Persentase	100	80.000.000	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	TENGGARONG	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja	Persentase	0	0	

			Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik						Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik				
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	TENGGARONG	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	2	80.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	TENGGARONG	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	0	0	
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	TENGGARONG	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	1	80.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	TENGGARONG	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	0	0	
KELURAHAN JAHAB						1.980.000.000						1.980.000.000	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	JAHAB	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	80.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	JAHAB	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	130.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	JAHAB	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	65.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	JAHAB	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	115.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	JAHAB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	45.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	JAHAB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	95.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	JAHAB	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	JAHAB	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JAHAB	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	1	15.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JAHAB	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	1	15.000.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	JAHAB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	15.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	JAHAB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	15.000.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	JAHAB	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	1.900.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	JAHAB	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	1.850.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JAHAB	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	1.317.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JAHAB	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	750.000.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	JAHAB	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	17.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	JAHAB	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	17.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	JAHAB	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	JAHAB	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	450.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	JAHAB	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Pokmas / Ormas	1	1.100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	JAHAB	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Pokmas / Ormas	1	283.000.000	

			Masyarakat di Kelurahan						Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	JAHAB	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	583.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	JAHAB	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	1.100.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	JAHAB	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	144.500.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	JAHAB	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	22	1.100.000.000	
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	JAHAB	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	1	438.500.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	JAHAB	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	1	0	
KELURAHAN SUKARAME						1.530.000.000						1.530.000.000	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	SUKARAME	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	69.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	SUKARAME	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	130.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	SUKARAME	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	69.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	SUKARAME	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	130.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SUKARAME	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	45.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SUKARAME	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	106.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SUKARAME	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	12.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SUKARAME	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	12.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SUKARAME	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Paket	1	12.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SUKARAME	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Paket	1	12.000.000	

			dan Konsultasi SKPD						dan Konsultasi SKPD				
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	SUKARAME	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	1.461.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	SUKARAME	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	1.400.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	SUKARAME	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	870.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	SUKARAME	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	650.000.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	SUKARAME	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	20.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	SUKARAME	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	20.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	SUKARAME	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	SUKARAME	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	450.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	SUKARAME	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	650.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	SUKARAME	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	180.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	SUKARAME	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	591.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	SUKARAME	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	750.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	SUKARAME	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	491.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	SUKARAME	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	13	650.000.000	

7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	SUKARAME	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	1	100.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	SUKARAME	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	1	100.000.000	
KELURAHAN LOA IPUH DARAT						1.580.000.000						1.580.000.000	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	LOA IPUH DARAT	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	45.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	LOA IPUH DARAT	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	130.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	LOA IPUH DARAT	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	45.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	LOA IPUH DARAT	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	130.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	LOA IPUH DARAT	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	45.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	LOA IPUH DARAT	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	130.000.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	LOA IPUH DARAT	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	1.535.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	LOA IPUH DARAT	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	1.450.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	LOA IPUH DARAT	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	900.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	LOA IPUH DARAT	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	750.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	LOA IPUH DARAT	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	LOA IPUH DARAT	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	450.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	LOA IPUH DARAT	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	700.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	LOA IPUH DARAT	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	300.000.000	

7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	LOA IPUH DARAT	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	635.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	LOA IPUH DARAT	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	700.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	LOA IPUH DARAT	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	635.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	LOA IPUH DARAT	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	14	700.000.000	
KELURAHAN MELAYU						3.230.000.000						3.230.000.000	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	MELAYU	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	85.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	MELAYU	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	130.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	MELAYU	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	85.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	MELAYU	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	130.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MELAYU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	45.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MELAYU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	90.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	MELAYU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	MELAYU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MELAYU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket	1	10.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MELAYU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket	1	10.000.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	MELAYU	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	3.145.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	MELAYU	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	3.100.000.000	

7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	MELAYU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	2.580.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	MELAYU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	710.000.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	MELAYU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	30.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	MELAYU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	30.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	MELAYU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	MELAYU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	450.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	MELAYU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	2.350.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	MELAYU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	230.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	MELAYU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	565.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	MELAYU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	2.390.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	MELAYU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	445.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	MELAYU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	47	2.350.000.000	
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	MELAYU	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	1	120.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	MELAYU	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	1	40.000.000	
KELURAHAN BUKIT BIRU						2.080.000.000						2.080.000.000	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	BUKIT BIRU	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	75.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	BUKIT BIRU	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	130.000.000	

	Daerah Kabupaten/Kota						Daerah Kabupaten/Kota						
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BUKIT BIRU	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	65.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BUKIT BIRU	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	120.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BUKIT BIRU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	45.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BUKIT BIRU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	100.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BUKIT BIRU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket	1	20.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BUKIT BIRU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket	1	20.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BUKIT BIRU	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	1	10.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BUKIT BIRU	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	1	10.000.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BUKIT BIRU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	10.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BUKIT BIRU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	10.000.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	BUKIT BIRU	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	2.005.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	BUKIT BIRU	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	1.950.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	BUKIT BIRU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	1.450.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	BUKIT BIRU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	750.000.000	

7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	BUKIT BIRU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	50.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	BUKIT BIRU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	50.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	BUKIT BIRU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	BUKIT BIRU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	450.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	BUKIT BIRU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	1.200.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	BUKIT BIRU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	250.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	BUKIT BIRU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	555.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	BUKIT BIRU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	1.200.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	BUKIT BIRU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	555.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	BUKIT BIRU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	24	1.200.000.000	
KELURAHAN LOA TEBU						1.930.000.000						1.930.000.000	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	LOA TEBU	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	54.140.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	LOA TEBU	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	130.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	LOA TEBU	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	54.140.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	LOA TEBU	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	130.000.000	

7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	LOA TEBU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	45.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	LOA TEBU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	120.860.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LOA TEBU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket	1	9.140.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LOA TEBU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket	1	9.140.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	LOA TEBU	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	1.875.860.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	LOA TEBU	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	1.800.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	LOA TEBU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	1.265.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	LOA TEBU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	750.000.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LOA TEBU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	15.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LOA TEBU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	15.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	LOA TEBU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	LOA TEBU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	450.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	LOA TEBU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	1.050.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	LOA TEBU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	285.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	LOA TEBU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	610.860.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	LOA TEBU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	1.050.000.000	

	Tingkat Kecamatan						Tingkat Kecamatan						
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	LOA TEBU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	475.860.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	LOA TEBU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	21	1.050.000.000	
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	LOA TEBU	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	1	135.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	LOA TEBU	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	0	0	
KELURAHAN PANJI						1.830.000.000						1.830.000.000	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PANJI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	71.021.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PANJI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	130.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PANJI	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	64.021.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PANJI	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	123.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PANJI	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	45.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PANJI	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	103.979.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PANJI	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	19.021.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PANJI	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	19.021.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PANJI	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	1	7.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PANJI	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	1	7.000.000	

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PANJI	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	7.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PANJI	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	7.000.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	PANJI	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	1.758.979.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	PANJI	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	1.700.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	PANJI	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	1.190.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	PANJI	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	730.000.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	PANJI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	40.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	PANJI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	40.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PANJI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PANJI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	450.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PANJI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	950.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PANJI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	240.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	PANJI	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	568.979.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	PANJI	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	970.000.000	

	Tingkat Kecamatan						Tingkat Kecamatan						
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	PANJI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	308.979.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	PANJI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	19	950.000.000	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	PANJI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	1	240.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	PANJI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	1	0	
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	PANJI	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	1	20.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	PANJI	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	1	20.000.000	
KELURAHAN MANGKURAWANG						1.880.000.000						1.880.000.000	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	MANGKURAWANG	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	63.500.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	MANGKURAWANG	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	130.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	MANGKURAWANG	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	45.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	MANGKURAWANG	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	111.500.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MANGKURAWANG	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	45.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MANGKURAWANG	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	111.500.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	MANGKURAWANG	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	1	18.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	MANGKURAWANG	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	1	18.500.000	

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	MANGKU RAWANG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	18.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	MANGKU RAWANG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	18.500.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	MANGKU RAWANG	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	1.816.500.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	MANGKU RAWANG	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	1.750.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	MANGKU RAWANG	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	1.240.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	MANGKU RAWANG	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	750.000.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	MANGKU RAWANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	40.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	MANGKU RAWANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	40.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	MANGKU RAWANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	MANGKU RAWANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	450.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	MANGKU RAWANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	1.000.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	MANGKU RAWANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	260.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	MANGKU RAWANG	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	576.500.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	MANGKU RAWANG	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	1.000.000.000	

	Tingkat Kecamatan						Tingkat Kecamatan						
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	MANGKURAWANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	0	0	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	MANGKURAWANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	20	1.000.000.000	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	MANGKURAWANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	1	140.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	MANGKURAWANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	0	0	
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	MANGKURAWANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	1	436.500.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	MANGKURAWANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	0	0	
KELURAHAN TIMBAU						2.680.000.000						2.680.000.000	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	TIMBAU	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	77.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	TIMBAU	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	130.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	TIMBAU	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	77.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	TIMBAU	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	130.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TIMBAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	45.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TIMBAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	98.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	TIMBAU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	32.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	TIMBAU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	32.000.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	TIMBAU	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Presentase	100	2.603.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	TIMBAU	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Presentase	100	2.550.000.000	

			Desa/Kelurahan yang Aktif						Desa/Kelurahan yang Aktif				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	TIMBAU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	2.015.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	TIMBAU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	750.000.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	TIMBAU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	20.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	TIMBAU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	20.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	TIMBAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	195.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	TIMBAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	450.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	TIMBAU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	1.800.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	TIMBAU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	280.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	TIMBAU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	588.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	TIMBAU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	1.800.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	TIMBAU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	0	0	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	TIMBAU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	36	1.800.000.000	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	TIMBAU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	1	588.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	TIMBAU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	0	0	
KELURAHAN BARU						1.730.000.000						1.730.000.000	

7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BARU	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	130.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BARU	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	130.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BARU	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	120.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BARU	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	120.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BARU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	39.984.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BARU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	39.984.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BARU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	67.569.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BARU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	67.569.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BARU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket	1	12.447.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BARU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket	1	12.447.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BARU	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	1	10.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BARU	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	1	10.000.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BARU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	10.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BARU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	10.000.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan	BARU	Persentase Lembaga	Presentase	100	1.600.000.000	Program Pemberdayaan	BARU	Persentase Lembaga	Presentase	100	1.600.000.000	

	Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif				Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	BARU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	1.600.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	BARU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	525.000.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	BARU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	25.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	BARU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	25.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	BARU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	BARU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	450.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	BARU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	1.375.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	BARU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	50.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	BARU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	0	0	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	BARU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	1.075.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	BARU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	0	0	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	BARU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	17	850.000.000	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	BARU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	0	0	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	BARU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	1	225.000.000	
KELURAHAN MALUHU						2.080.000.000						2.080.000.000	

7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	MALUHU	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	75.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	MALUHU	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	130.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	MALUHU	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	75.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	MALUHU	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	130.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MALUHU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	45.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MALUHU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	100.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MALUHU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket	1	30.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MALUHU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket	1	30.000.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	MALUHU	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	2.005.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	MALUHU	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	1.950.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	MALUHU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	2.005.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	MALUHU	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	750.000.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	MALUHU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	15.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	MALUHU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	15.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan	MALUHU	Jumlah Sarana dan Prasarana	Unit	1	200.000.000	Pembangunan Sarana dan	MALUHU	Jumlah Sarana dan Prasarana	Unit	3	450.000.000	

	Prasarana Kelurahan		Kelurahan yang Terbangun				Prasarana Kelurahan		Kelurahan yang Terbangun				
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	MALUHU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	1.790.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	MALUHU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	285.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	MALUHU	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lembaga	0	0	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	MALUHU	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lembaga	1	1.200.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	MALUHU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	0	0	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	MALUHU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	24	1.200.000.000	
KELURAHAN LOA IPUH						4.730.000.000						4.730.000.000	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	LOA IPUH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	65.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	LOA IPUH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI	70	130.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	LOA IPUH	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	55.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	LOA IPUH	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	unit	1	120.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	LOA IPUH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	45.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	LOA IPUH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	110.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LOA IPUH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket	1	10.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LOA IPUH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket	1	10.000.000	

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	LOA IPUH	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	1	10.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	LOA IPUH	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	1	10.000.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	LOA IPUH	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	10.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	LOA IPUH	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	10.000.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	LOA IPUH	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	4.665.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	LOA IPUH	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Presentase	100	4.600.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	LOA IPUH	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	4.535.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	LOA IPUH	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	750.000.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LOA IPUH	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	15.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LOA IPUH	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	15.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	LOA IPUH	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	LOA IPUH	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	450.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	LOA IPUH	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Pokmas / Ormas	1	4.320.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	LOA IPUH	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Pokmas / Ormas	1	285.000.000	

			Masyarakat di Kelurahan						Masyarakat di Kelurahan				
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	LOA IPUH	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	130.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	LOA IPUH	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	1	3.850.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	LOA IPUH	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	0	0	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	LOA IPUH	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	77	3.850.000.000	
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	LOA IPUH	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	1	130.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	LOA IPUH	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	0	0	
Jumlah						119.182.790.520						107.920.481.032	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tenggarong Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022–2026. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tenggarong Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan : "Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RANHIR RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Tenggarong dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Berikut ini usulan program dan kegiatan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang): *(Tabel T-C 32)*

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Tenggarong

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
1	Semenisasi Gg. Taqwa RT.4 kel. Panji Jalan Berlubang	Jl. Stadion Gg. Taqwa RT. 4 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
2	Pengaspalan Gg. Kenanga Rt.5 Kel. Panji	Jl. KH.Dewantara Gg. Kenanga RT.5 Kelurahan Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
3	Pengaspalan Badan jalan RT. 2 Kel. Panji	Jl. KH Dewantara RT.2 Kelurahan Panji, Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
4	Semenisasi Jl. Cempedak Gg. Todak Rt. 7 kel. Panji	Jl. Cempedak Gg. Todak Rt. 7 kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
5	Semenisasi Jl. Lai RT. 7 (Paling ujung) kel. Panji	Jl. Lai RT. 7 kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
6	pembuatan gorong-gorong Jl. Lai Gg. Keluarga RT. 7 kel. Panji	Jl. Lai Gg. Keluarga RT. 7 kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)
7	Pengaspalan Jalan Gang 3 RT. 10 Kel. Panji	Jl. Rondong Demang Gang 3 RT. 10 Kel. Panji, Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
8	Pembuatan Drainase Gg.Keluarga 3 RT. 11 Kelurahan Panji	Jl. KH Dewantara Gg. Keluarga 3 RT. 11 Kelurahan Panji , Kab.	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	180.000.000	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
		Kutai Kartanegara					
9	Semenisasi Lapangan Serbaguna RT.12 Kel. Panji	Jl. Stadion Timur II Rt.12 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	250.000.000	Ruang Terbuka Non Hijau di perkotaan (Paving, Rabat/Semenisasi)
10	Semenisasi Jalan Gang RT.12 Kel. Panji	Jl. Stadion Timur II RT.12 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
11	Peningkatan dan pelebaran jembatan di Jl. Tenis Lapangan GG. 2 Blok B Kel. Panji	Jl. Tenis Lapangan GG. 2 Blok B Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
12	Peningkatan Badan Jalan Gang Aris RT. 14 (Lanjutan) Kel. Panji	Jl. Tenis Lapangan Gang Aris RT. 14 Kel Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
13	Semenisasi Jalan Gang Maulida RT. 14 Kel. Panji	Jl. Tenis Lapangan Gang Maulida RT. 14 Kel. Panji, Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
14	Pembuatan Drainase Gg. cempaka Jl. Anggana RT.15 Kel. Panji	Jl. Anggana Gg. cempaka RT.15 Kel. Panji, Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	260.000.000	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)
15	Semenisasi Jalan gang cempaka Jl. Anggana RT.15 Kel. Panji	Jl. Anggana Gang Cempaka RT.15 Kel. Panji, Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong Seberang
16	Pembuatan paret gang tulip Jl. Anggana RT.15 Kel. Panji	Jl. Anggana Gg. Tulip RT.15 Kel. Panji, Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	400.000.000	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)
17	Pembuatan jalan dari gang tulip tembus Jl. bougenvil s/d jl. Anggana RT.15 Kel. Panji	Jl. Anggana RT.15 Kel. Panji, Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
18	Pelebaran Pos Kamling RT.15 Kel. Panji	Jl. Anggana RT.15 Kel. Panji , Kab. Kutai	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Pos Keamanan di Kecamatan Tenggarong

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
		Kartanegara		Dilimpahkan			
19	Perbaikan Jalan Rondong Demang Gang Dahlia RT. 15 Kel. Panji	Jalan Rondong Demang Gang Dahlia RT. 15 Kel. Panji, Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
20	Pembuatan Pagar Turap Simpang 3 Jalan Lai RT.16 Kel. Panji	Jl. Lai RT.16 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
21	Normalisasi Parit Buatan Jl. Selimpat Rt.17 Kel. Panji	Jl. Selimpat Rt.17 Kel. Panji, Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
22	Lanjutan Pengurugan Gg. Keli Jl. Selimpat Rt.17 Kel. Panji	Jl. Selimpat Rt.17 Kel. Panji, Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
23	Lanjutan Peningkatan Jalan Gg. Pipit Jl. Selimpat Rt.17 Kel. Panji	Jl. Selimpat Rt.17 Kel. Panji, Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
24	Peningkatan Jalan Gg. Durian Jl. Selimpat Rt.17 Kel. Panji	Jl. Selimpat Rt.17 Kel. Panji, Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
25	Lanjutan Pengurugan Gg. Patin Jl. Selimpat Rt.17 Kel. Panji	Jl. Selimpat Gg Patin Rt.17 Kel. Panji, Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
26	Peningkatan Jalan selimpat Gg. Puyu Jl. Selimpat Rt.17 Kel. Panji	Jl. Selimpat Gg. Puyu Rt.17 Kel. Panji, Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
27	Semenisasi gg. Rumbia RT 18 Kel. Panji	Jl. Anggana gg. Rumbia RT 18 Kel. Panji, Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
28	Pembuatan Turap Gg. Rumbia RT 18 Kel. Panji	jl. Anggana Gg. Rumbia RT 18 Kel. Panji, Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
29	Semenisasi Gg. RamaniaRT 18 Kel. Panji	Jl. Anggana Gg. RamaniaRT 18 Kel. Panji, Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
30	semenisasi Gg. Usaha Tani RT 18 Kel. Panji	Jl. Anggana Gg. Usaha Tani RT 18 Kel. Panji, Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
31	Pembangunan Pos Kamling RT.19 Kel. Panji	Jl. Gunung Sari RT.19 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Pos Keamanan di Kecamatan Tenggarong
32	Semenisasi Jalan Jl. Makam RT.19 Kel. Panji	Jl. Makam RT.19 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
33	Semenisasi Jalan Jl. Bahagia RT. 19 Kel. Panji	Jl. Bahagia RT. 19 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
34	Semenisasi Jl. Wali Barokah RT.19 Kel. Panji	Jl. Wali Barokah RT.19 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
35	Peningkatan Jalan Jl. Kenanga RT.19 Kel. Panji	Jl. Kenanga RT.19 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
36	Pembangunan Posko Balakarcana Kelurahan Panji	Jl. stadion Timur RT. 10 Kel. panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Pos Keamanan di Kecamatan Tenggarong
37	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Kelurahan Panji	Jl. Anggana Rt.15 Kel. panji, Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	150.000.000	Pelatihan Kelompok Tani (Poktan)
38	Pelatihan Sulam Tumpar PKK Kel. Panji	Jl. Tenis Lapangan RT.13 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	50.000.000	Pembekalan Menjahit
39	Pelatihan Menjahit RT. 6 Kel. Panji	Jl. KH.dewantara RT.6 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	100.000.000	Pembekalan Menjahit

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
40	Pelatihan / Kursus Menjahit Pakaian RT. 14 Kel. Panji	Jl. durian RT.14 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	100.000.000	Pembekalan Menjahit
41	Pelatihan Pertanian RT 18 Kel. Panji	Jl. Anggana Rt.18 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	150.000.000	Pelatihan Kelompok Tani (Poktan)
42	Pelatihan Keterampilan Kerajinan RT 18 Kel. Panji	Jl. Anggana Rt.18 kel panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pelatihan Anggota Organisasi Kepemudaan dalam berwirausaha
43	Pelatihan UMKM Rt.18 Kel. panji	Jl. Anggana Rt.18 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pelatihan Pemuda untuk Berwirausaha (Wirausaha Perseorangan untuk Pemula)
44	Pelatihan Menjahit RT 18 Kel. Panji	Jl.Anggana Rt.18 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	100.000.000	Pembekalan Menjahit
45	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik RT 18 Kel. Panji	Jl.Anggana Rt.18 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	150.000.000	Pelatihan Kelompok Tani (Poktan)
46	Pelatihan rias Pengantin RT 18 Kel. Panji	Jl. Anggana Rt.18 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pelatihan Pemuda untuk Berwirausaha (Wirausaha Perseorangan untuk Pemula)
47	Pengadaan Gerobak UKM RT. 1 Kel. Panji	Jl.KH Dewantara Rt.1 Kel. panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	51.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan di dunia usaha
48	Pengadaan Sarana Pemadam Kebakaran RT. 1 Kel. Panji	Jl. KH. Dewantara Rt.1 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	100.000.000	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Mesin Pompa, Selang, Nozle, Conection, baju tahan panas, sepatu, helm) (Karhutla)
49	Pengadaan Gerobak UKM RT.3 Kel. Panji	Jl. KH.Dewantara RT.3 Kel. Panji, Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	51.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan di dunia usaha
50	Pengadaan Sarana Pemadam Kebakaran RT. 3 Kel. Panji	Jl. KH. Dewantara RT. 3 Kel. Panji, Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	100.000.000	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Mesin Pompa, Selang, Nozle, Conection, baju tahan panas, sepatu, helm) (Karhutla)
51	Pembuatan Tempat Sampah Plat RT.5 Kel. Panji	Jl. Mawar RT.5 Kel. Panji, Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembuatan Tempat Sampah Penampungan Sementara di Kecamatan Tenggarong

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
52	Pengadaan Anak Bebek RT. 14 Kel. Panji	Jl. Durian RT.14 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	150.000.000	Pengadaan bibit Ternak Kambing
53	perkuatan yang disusun menyerupai bentuk dinding yang berfungsi sebagai penahan tebing, penahan galian	Jl Bukit Sion RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara	Jahab	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
54	Penurapan Jl. Bukit Hermon perkuatan yang disusun menyerupai bentuk dinding yang berfungsi sebagai penahan tebing, penahan galian	JL. Bukit Sion RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara	Jahab	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
55	Bantuan Pengadan Bibit Ternak Kerbau, Pengadaan bibit ternak kerbau ditekankan pada jenis bibit unggul kerbau rawa yang lebih diutamakan untuk kelompok peternak dari masyarakat miskin dan belum pernah menerima bantuan	Jl. Bukit Sion RT.01, Kab. Kutai Kartanegara	Jahab	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	300.000.000	Pengadaan bibit Ternak Kerbau
56	Semenisasi Jl. Lai GG. Petai RT. 7 kel. Panji	Jl. Lai GG. Petai RT. 7 kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
57	Pengurukan Jl. Lai Gg. Mangga RT. 7 kel. Panji	Jl. Lai Gg. Mangga RT. 7 kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
58	Semenisais Jl. Lai Gg. Kedondong RT. 7 kel. Panji	Jl. Lai Gg. Kedondong RT. 7 kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
59	Peningkatan Jalan Jl. Kenanga RT.19 Kel. Panji Lokasi ujung Jalan Jl Gunung Sari RT.19 Kel. Panji	Jl. Kenanga RT.19 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
60	Pengadaan Laptop Teknis Kantor Kelurahan Panji	Jl. Tenis lapangan RT.13 Kel. Panji, Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Fasilitasi sarana prasarana desa
61	Belum tersedianya akses jalan yang memadai sebagai sarana prasarana masyarakat	Jalan Tegal Arum RT.02 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
62	Belum Ada Saluran Pembuangan Air yang Permanen	Jalan Tegal Arum RT.02 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
63	Drainase yang belum memadai sebagai saluran dan sarana pembuangan air kotor	Jalan Swadaya RT.02 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
64	Belum tersedianya akses jalan yang memadai sebagai sarana prasarana masyarakat	Jalan Joko Tingkir RT.02 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
65	Belum tersedianya akses jalan yang memadai sebagai sarana prasarana masyarakat	Jalan Pulau Atas RT.02 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
66	Drainase yang belum memadai sebagai saluran dan sarana pembuangan air kotor	Jalan Pulau Atas RT.02 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
67	Rawan Longsor / Tanah Bergeser	Jalan H. Makmur RT.03 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
68	Rawan Longsor / Tanah Bergeser	Jalan Swadaya RT.03 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
69	Rawan Longsor	Jalan Swadaya RT.03 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
70	Rawan Longsor	Jalan Tegal Arum RT.03 Menuju RT.02 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
71	Belum ada akses Jembatan penghubung	Jalan H. Makmur RT.03 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
							Kecamatan Tenggarong
72	Rawan Longsor	Jalan Senopati RT.03 Menuju RT.02 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
73	Rawan Longsor	RT.03 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
74	Rawan Longsor	RT.03 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
75	Drainase yang belum memadai sebagai saluran dan sarana pembuangan air kotor	Jalan Tri karya RT.04 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
76	Perlunya Pembutan Jembatan Penghubung di Wilayah Tersebut	Jalan Mangga RT.04 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
77	Drainase yang belum memadai sebagai saluran dan sarana pembuangan air kotor	Jalan Mangga RT.04 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
78	Belum tersedianya akses jalan yang memadai sebagai sarana prasarana masyarakat	Jalan Margatama - Jalan Jambu RT.04 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
79	Belum tersedianya akses jalan yang memadai sebagai sarana prasarana masyarakat	Jalan Tri Karya RT.04 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
80	Belum Memadainya Gorong-gorong/talud sebagai sarana pembuang air kotor	Jalan Kuini RT.04 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
81	Jembatan Rusak	Jalan Merpati RT.06 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
							Kecamatan Tenggarong
82	Belum ada Parit	Jalan Merpati RT.06 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
83	Belum ada Semenisasi	Gang Merpati RT.06 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
84	Parit Rusak	Gang Merpati RT.06 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
85	Perlu Penambahan Lanjutan Semenisasi	Jalan Merpati RT.06 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
86	Jalan Rusak	Jalan Kemuning 1 RT.07 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
87	Kelancaran Saluran Air Terhambat, sering banjir	Jalan Kemuning RT.07 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
88	Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Kelurahan Panji 2025 (ADK)	Jl. Tenis Lapangan RT.13 Kelurahan Panji, Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	150.000.000	Fasilitasi sarana prasarana desa
89	Pembuangan Limbah Rumah Tangga	Jalan Margatama RT.09 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
90	Jalan Sempit	Jalan Margatama RT.09 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
91	Sering Banjir	Jalan Himba RT.09 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
		Kartanegara					Tenggarong
92	Perlu Penambahan Lanjutan Semenisasi	Jalan Damali RT.09 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
93	Tanah Longsor	RT.09 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong Gudang Kelompok Tani Girimulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
94	Jalan Rusak Parah	Jalan Kauman RT.10 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
95	Jalan Rusak Parah	Gang Mandiri RT.10 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
96	Longsor	Gang Sengon RT.10 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
97	Saluran Tersumbat	RT.10 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
98	Belum ada Semenisasi	Gang Sengon RT.10 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
99	Perlu Penambahan Lanjutan Semenisasi	Jalan langgar RT.08 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
100	Jalan Rusak dan Licin	Gang Sepakat RT.08 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
101	Rawan Longsor	Gang Langgar RT.08 Kel. Bukit Biru Kec.	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
		Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara		Dilimpahkan			Sederhana Kecamatan Tenggarong
102	Rawan Longsor	RT.08 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
103	Jalan Rusak	Gang Durian RT.08 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
104	Longsoran tanah menutupi parit	RT.08 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
105	Belum ada akses jalan	Gang Damai RT.08 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
106	Jalan Berbatu	Gang Kelapa Gading RT.08 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
107	Jalan Rusak	Gang Keluarga RT.08 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
108	Menahan Lonsor & Menahan Tiang Listrik yg terkikis	Jalan Banyumas RT.11 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
109	Menampong Air Limpahan dari lereng	Jalan Bawon RT.11 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
110	Penataan parkir	Mushola Al Hikmah RT.11 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
111	Masih Tanah/belum ada semenisasi	Jl. Bawon ke Jl. Langgar RT.11 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
							Kecamatan Tenggarong
112	Tidak muat menampung debet air	Jalan Banyumas RT.11, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
113	Jalan Longsor (Menyempit)	Jalan Usaha Tani RT.12 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
114	Jembatan Yang ada rusak dan Amblas	RT.12 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
115	Parit yang ada tersumbat	RT.12 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
116	Jalan Longsor Pecah	RT.12 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
117	Belum ada parit	RT.12 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
118	Belum ada akses Jembatan penghubung	RT.14, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
119	Rawan Longsor / Tanah Bergeser	RT.14, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
120	Rawan Longsor	Jalan Margatama Mulawarman RT.14 , Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
121	Rawan Longsor/ Rawan Kecelakaan karena tikungan tajam	Jalan Swadaya RT.14, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
122	Rawan Longsor	Jalan Makam Dusun 2 RT.14 , Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
123	Rawan Banjir	Jalan Beringin RT.14, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
124	Rawan Banjir	Jalan Surakarta 1 RT.14, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
125	Rawan Abrasi / Longsor	Jalan Gang Todak RT.14, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
126	Rawan Banjir	Jalan Makam Dusun 2 RT.14, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
127	Badan jalan Masih Batu	Jl. Pemakaman Dusun 2 RT.14, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
128	Badan jalan Masih Batu	Jl. Gang Cemani RT.14, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
129	Badan jalan Masih Batu	Jl. Gang Sudiyo RT.14 , Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
130	Penghubung Jl. Swadaya dan Jl. Gang Todak	Jalan Gang Famili RT.14, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
131	Penghubung Jl. Surakarta 1 dan Jalan Masjid	Jalan Gang Marino RT.14, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
132	Badan Jalan Sudah Rusak	Jalan Surakarta 1 RT.14, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
133	Badan Jalan Sudah Rusak	Jalan Beringin RT.14, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
134	Badan Jalan Sudah Rusak	Gang Todak RT.14, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
135	Parit / Drainase sudah tidak maximal /Rusak/Tertimbun tanah	Jalan Swadaya RT.14, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
136	Parit / Drainase sudah tidak maximal /Rusak/Tertimbun tanah	Jalan Margatama Mulawarman RT.14 , Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
137	Parit / Drainase sudah tidak maksimal /Rusak/Tertimbun tanah	Jalan Surakarta 1 RT.14 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
138	Sangat diperlukannya Akses Jalan Yang Memadai	Gang 2 family RT.16 spontan mangkurawang, Kab. Kutai Kartanegara	Mangkurawang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
139	Pelatihan Aneka Keterampilan bagi Masyarakat	Kelurahan Jahab RT 1 , Kab. Kutai Kartanegara	Jahab	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pelatihan Pemuda untuk Berwirausaha (Wirausaha Perseorangan untuk Pemula)
140	Sulitnya akses jalan yang digunakan untuk mengangkut hasil pertanian utama yaitu padi dll dikarenakan jalan masih tanah dan kadang	Semenisasi Jalan Tani Harapan RT. 14 , Kab. Kutai Kartanegara	Mangkurawang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
	berlumpur tebal						Tenggarong
141	Jembatan/Gorong-gorong yang amblas dan rusak akibat sering tergerus air deras saat musim penghujan dan rawan untuk ambruk dan menyembabkan banjir kian parah	Rehabilitasi Jembatan - Jl. Usaha Tani RT. 14, Kab. Kutai Kartanegara	Mangkurawang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
142	Jalan permukiman yang masih berupa tanah dan merupakan lereng sehingga bila terjadi hujan jalan menjadi sangat licin dan berlumpur	Semenisasi Gang 03 - Jl. Datar Wanyi RT. 14, Kab. Kutai Kartanegara	Mangkurawang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
143	Jalan permukiman yang masih berupa tanah sehingga bila terjadi hujan jalan menjadi sangat licin dan berlumpur	Semenisasi Gang Arjuna - Jl. Lamin Datu RT. 14, Kab. Kutai Kartanegara	Mangkurawang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
144	SALURAN AIR LIMBAH RUMAH TANGGA DAN PEMBUANGAN AIR SAAT HUJAN MAMPET SANGAT DIPERLUKAN UNTUK ANTISIPASI BANJIR	SEPANJANG JL. KRAMAJAYA SEBELAH KIRI JALAN RT.8 Kel.MANGKURAWANG, Kab. Kutai Kartanegara	Mangkurawang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1.000.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
145	KONDISI JALAN RUSAK PARAH	SEMENISASI JL. KRAMAJAYA Gg, KRAMAJAYA 1, Kab. Kutai Kartanegara	Mangkurawang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
146	Jalan permukiman yang masih berupa tanah sehingga bila terjadi hujan jalan menjadi sangat licin dan berlumpur	Semenisasi Gang Mandiri-Jl. Datar Wanyi RT. 14, Kab. Kutai Kartanegara	Mangkurawang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
147	KONDISI JALAN TITIAN DARI KAYU ULIN SUDAH RUSAK DAN TIDAK LAYAK	RT.08 SEMENISASI JALAN TITIAN Gg. ULIN, Kab. Kutai Kartanegara	Mangkurawang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
148	BELUM ADA BADAN JALAN MAKA SANGAT PERLU DIBANGUNKAN AKSES JALAN	PEMBANGUNAN BARU JALAN GANG ABUL KRAMAJAYA 1 RT.8 Kel.MANGKURAWANG, Kab. Kutai Kartanegara	Mangkurawang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
149	AGAR AIR YANG MENGALIR LANGSUNG IKUT TERBUANG KE SUNGAI MANGKURAWANG MAKA PERLUNYA PEMBUATAN DRAINASE PEMBUANGAN AIR LIMBAH YANG MELINTASI JL. USAHA TANI MENUJU PEMBUANGAN JALUR PASAR MANGKURAWANG	RT.8 Kel.Mangkurawang, Kab. Kutai Kartanegara	Mangkurawang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
150	KONDISI JALAN MASIH RUSAK SEBAGIAN KARENA PEKERJAAN SEMENISASI TAHUN KEMAREN BELUM TUNTAS	LANJUTAN SEMENISASI JL. USAHA TANI 1 BLOK A, Kab. Kutai Kartanegara	Mangkurawang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
151	KONDISI JALAN MASIH RUSAK SEBAGIAN KARENA PEKERJAAN SEMENISASI TAHUN KEMAREN BELUM TUNTAS	LANJUTAN SEMENISASI JL. USAHA TANI 1 BLOK B, Kab. Kutai Kartanegara	Mangkurawang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
152	SALURAN AIR LIMBAH RUMAH TANGGA DAN AIR HUJAN SAAT MUSIM HUJAN TIDAK MENGALIR KARENA TERTUTUP TANAH DAN SAMPAH	REHAB PARIT DAN SELOKAN DI SEPANJANG JALAN USAHA TANI HINGGA JL. USAHA TANI 1 Kel.Mangkurawang, Kab. Kutai Kartanegara	Mangkurawang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
153	Penurapan Parit/drainase permukiman yang menghadap ke rumah warga yang berpotensi menggerus tanah(satu sisi yang menghadapjalan sudah di turap sebagian	Penurapan Parit/Drainase - Jl. Datar Wanyi RT. 14, Kab. Kutai Kartanegara	Mangkurawang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
154	BELUM ADA SEMENISASI MASIH JALAN TANAH	SEMENISASI JL. Gg, ANSAR RT.8 Kel.Mangkurawang, Kab. Kutai Kartanegara	Mangkurawang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
155	Gorong-gorong/jembatan Gang 2 tergerus air yang mungkin tidak lama lagi akan ambruk	Rehabilitasi Jembatan / gorong-gorong - Jl. Datar Wanyi Gg. 02 RT. 14, Kab. Kutai Kartanegara	Mangkurawang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
156	Peningkatan jalan Gang Membuat baru Jembatan Gang Ulin Gang 4 Blok C wilayah RT. 67 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong	Jl. RT. 67, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Ipuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	150.000.000	Rehabilitasi Jalan Menuju Akses Pendidikan,Kesehatan, Wisata dan Jalan Produksi Kabupaten
157	Peningkatan Semenisasi cor Gang RT. 67 Jalan panjaitan Gang Ikhlas BLOK C Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong	Jl. Panjaitan Gg. Ikhlas Blok C RT. 67, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Ipuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	205.000.000	Rehabilitasi Jalan Menuju Akses Pendidikan,Kesehatan, Wisata dan Jalan Produksi Kabupaten

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
158	Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Tenggarong	Peningkatan Badan Jalan Gang H.Hasbullah RT.12, Kab. Kutai Kartanegara	Mangkurawang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
159	Rehab Gang H. Jailani JALAN SUDAH RUSAK BERLUBANG	Jl. Jaya Mangku RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
160	Semenisasi Gang Melati JALAN SUDAH RUSAK	Gang Melati Jl. Jaya Mangku RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
161	Pengaspalan Jalan Seroja, JL.Kemuning,JL.Plamboyan dan JL.Cempaka	Kelurahan Sukarame RT.12 & 13, Kab. Kutai Kartanegara	Sukarame	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
162	Pengaspalan JL.Pergam,JL.Tiung,JL.Punai,JL.,Enggang,JL.Perg am 1, JL.Ahmad Dahlan 1, JL.Ketinjau	RT.009 Kelurahan Sukarame, Kab. Kutai Kartanegara	Sukarame	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
163	Drainase yang belum memadai sebagai saluran dan sarana pembuangan air kotor	Jalan Tegal Arum RT.01 Kel. Bukit Biru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
164	Belum adanya Mesin Pencacah Sampah Organik, Timbangan duduk dan Instalasi Hidroponik Bank sampah Al- Hidayah RT. 4 Kel. Maluhu	JALAN BONTANG RT. 4 Kel. Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	335.000.000	Pencacah Sampah Organik
165	Pagar Keliling Besi Makam Dusun 2 RT.14 Bukit Biru untuk Penanda Garis Batas makam	RT.14 Bukit Biru, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Fasilitasi sarana prasarana desa
166	Pembangunan Gudang Makam Dusun 2 RT.14 Bukit Biru	RT.14 Bukit Biru, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Fasilitasi sarana prasarana desa
167	Semensasi Jl. Sultan Sulaiman Jalan sudah Tidak layak digunakan	Jl. Sultan Sulaiman RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
168	Jalanan belum tersentuh pembangunan sedangkan badan jalan sudah ada dan digunakan masyarakat	Jalan Terongget 1 Loa Tebu Rt. 16, Kab.	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
	sekitarnya	Kutai Kartanegara		Lain yang Dilimpahkan			Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
169	Belum ada Parit Pasangan kalau hujan Lumpur Limbas ke jalan Umum	Jalan Tri Karya RT.05 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong , Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
170	Belum Memadainya Gorong-gorong/talud sebagai sarana pembuang air kotor	RT.05 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong , Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
171	Drainase yang belum memadai sebagai saluran dan sarana pembuangan air kotor	RT.05 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong , Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
172	Belum adanya saluran air permanen	Langgar Miftahul Jannah RT.05 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong , Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
173	Pembangunan Turap Gang Bustamam jalan ada sudah ada tetapi belum ada turap yang dibangun	Gg. Bustamam Rt. 01 , Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
174	Pembangunan pembuatan gorong-gorong plat decker Belum ada Gorong-gorong untuk mengantisifasi banjir jika hujan turun	Jalan Sultan Sulaiman Rt. 02, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
175	Drainase yang belum memadai sebagai saluran dan sarana pembuangan air kotor	RT.05 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong , Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
176	Semenisasi Gang Akhmad Gang yang ada sudah ada yang rusak sehingga apabila di lewati kendaraan takut terjadi musibah	Gang Akhmad Rt. 03, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
177	Semenisasi Gang Amal Gang sudah ada yang berlubang sehingga membahayakan pengguna kendaraan yang lewat	Gang Amal Rt. 04, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
178	Lanjutan Turap Jalan Jl Anggana RT 18 Kel. Panji	Jl Anggana RT 18 Kel. Panji, Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
179	Peningkatan Gang Swadaya Jalan nya sudah banyak lubang	Gang Swadaya RT . 05 , Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
180	Peningkatan Semenisasi/ rehab gang masjid 2 perlu perbaikan	Loa Tebu RT. 06, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
181	Belum Adanya Kanopi Menyebabkan Tidak adanya Tempat Untuk Kendaraan Operasional Balakar (Pembuatan Kanopi Halaman Balakarcana Sangaji RT. 10 Kel. Baru, Kec. Tenggarong)	Jl. AM. Sangaji RT.10 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Tenggarong
182	Belum Selesainya Pembangunan Jalan Menyebabkan Aktifitas Lalu Lintas Warga Terhambat (Semenisasi Jalan Samping Masjid Al Mujahidin RT. 11 Kel. Baru Kec. Tenggarong)	Jl. Tambak Rel RT.11 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
183	Banyaknya Kerusakan Jalan Menyebabkan Terganggunya akses jalan bagi masyarakat (Lanjutan Semenisasi Jalan Syarifudin 2 Blok E RT. 14 Kel. Baru, Kec. Tenggarong)	Jl. Tambak Rel Syarifuddin 2 Blok E RT.14 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
184	Belum Adanya Lanjutan Pembangunan Jembatan Ulin Menyebabkan Tidak adanya akses jalan warga menuju jalan di rt. 16 (Lanjutan Jembatan Ulin RT. 15 Yang Terintegrasi ke RT. 16)	Jl. Djafar Seman RT. 15 dan RT.16 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
185	Perlunya insentif bagi pelaku usaha budidaya ikan dalam upaya peningkatan kapasitas produksi melalui fasilitasi sarana budidaya ikan (PENGADAAN KOLAM TERPAL/ BAK PORTABEL, BIBIT IKAN SERTA PAKAN POKDAKAN ETAM MANDIRI JL.TAMBAK REL RT.11 KEL. BARU)	Jl. Tambak Rel RT. 11 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Penyediaan Kolam Terpal
186	Perlunya insentif bagi pelaku usaha budidaya ikan dalam upaya peningkatan kapasitas produksi melalui fasilitasi sarana budidaya ikan (Pengadaan keramba, bibit ikan dan pakanan ikan Pokdakan Pemuda Baru Sejahtera, RT. 09, Kel. Baru)	Jl. AM. Sangaji RT.09 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Penyediaan Unit Keramba

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
187	Perlunya insentif bagi pelaku usaha budidaya ikan dalam upaya peningkatan kapasitas produksi melalui fasilitasi sarana budidaya ikan (Pengadaan keramba, bibit ikan dan pakanan ikan Pokdakan Sangaji Raya, RT. 07, Kel. Baru)	Jl. AM. Sangaji RT.07 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Penyediaan Unit Keramba
188	Rehab semenisasi gang Aji Bambang Asnan Jalan sudah rusak	Loa Tebu RT . 08, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
189	Rehab dan semenisasi di gang Kuwini Jalan Sudah banyak yang rusak	Loa Tebu RT. 09 , Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
190	Peningkatan Badan Jalan (Gang Kenangan) Sangat diperlukan karena sebagian tidak layak di lewati	Loa Tebu RT .10, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
191	Semenisasi Gang Lima- Lima Jalan Yang Ada Sudah Tidak Layak	Loa Tebu RT .13 , Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
192	Peningkatan Badan jalan Hj. Dijok Jalan Perlu Perbaikan	Loa Tebu RT. 15, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
193	Semenisasi Jalan Poros Jalan rusak , Berlubang dan Licin	Loa Tebu RT 19 , Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
194	Lanjutan Semenisasi Gang Wangi- Wangi Jalan Masih belum selesai di Bangun	Loa Tebu RT. 16, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
195	Semenisasi Jalan kuburan Mentong / Mustamar sanngat di perlukan	Loa Tebu RT.17, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
196	Lanjutan Pengaspalan Jl. Gang 3 RT.1 Kel.Timbau	RT. 1 Timbau, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
							Tenggarong
197	Pengurukan dan Semenisasi Jalan Desa Tembus Gang 2 RT.1 Kel.Timbau	RT. 1 Timbau, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
198	Pembuatan Drainase dan Gorong-gorong Jalan Desa RT.1 Kel.Timbau	RT. 1, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
199	Pengecoran Gang Jafar Siddik/Samping Gapensi RT.02 Kel.Timbau	RT.2, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
200	Normalisasi Saluran Drainase di Gang 7 RT.02 Kel.Timbau	RT.2, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
201	Normalisasi Saluran Drainase di Jl. Ruwan 2 RT.02 Kel.Timbau	RT.2, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
202	Normalisasi Parit Jl. Jelawat RT.4 Kel.Timbau	RT.4, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
203	Pelebaran Jalan Seluang kanan Kiri RT.4 Kel.Timbau	RT.4, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
204	Semenisasi Gg. Annazah RT.6 Kel.Timbau	RT.6, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
205	semenisasi Jalan exs kusta pal 6 dalam RT.10 Kel.Timbau	RT.10, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
206	Pengaspalan Jalan Gg. Durian 3 RT.11 Kel.Timbau	RT.11, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
207	Peningkatan Jalan Gg. Durian 4 Tembus ke Gg.Durian 3 RT.11 Kel.Timbau	RT.11, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
208	Peningkatan Jalan Gg. Durian 5 RT. 11 Kel.Timbau	RT.11, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
209	Lanjutan Peningkatan Jalan Gg. Jarwo dan Gg. Subur RT.11 Kel.Timbau	RT.11, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
210	Pembuatan Badan Jalan Durian Manok tembus Jl. Karetan RT.11 Kel.timbau	RT.11, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
211	Peningkatan Jalan karetan RT.11 Kel.Timbau	RT.11, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
212	Pembuatan Turap Besi Cor Beton Jl.Durian manok RT.11 Kel.Timbau	RT.11, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
213	Peningkatan Jalan dalam Gg. Azzahra RT.11 Kel.Timbau	RT.11, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
214	Normalisasi Saluran drainase di wilayah RT.11 Kel.Timbau	RT.11, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
215	Lanjutan Pembuatan Badan Jln. RT 011 Tembus Ke RT. 017 Timbau	RT.11, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
216	Pembuatan Turap jalan RT.11 Kel.Timbau	RT.11, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
217	Peningkatan Jalan Gg. Keluarga RT.11 Kel.Timbau	RT.11, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
218	Peningkatan Jalan Gg. Walet RT.11 Kel.Timbau	RT.11, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
219	Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan RT.11 Kel.Timbau	RT.11, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
220	Pembangunan Turap Blok A Jalan Pesut RT.14 Kel.Timbau	RT.14, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
221	Pembuatan Turap RT.15 Kel.Timbau	RT.15, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
222	Normalisasi Gorong-gorong RT.15 Kel.Timbau	RT.15, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
223	Normalisasi Parit RT.16 Kel.Timbau	RT.16, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
224	Pengaspalan Jalan Pesut Gg. 5 RT.18 Kel.Timbau	RT.18, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
225	Pengaspalan Jalan Naga Gg.2 RT.18 Kel.Timbau	RT.18, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
226	Lanjutan Terusan Jalan Pesut Gg.5 RT.18 Kel.Timbau	RT.18, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
							Tenggarong
227	Pembuatan Jembatan Gg.1 RT.18 Kel.Timbau	RT.18, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
228	Pengaspalan jalan Jelawat Batu 3 RT.21 Kel.Timbau	RT.21, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
229	Pengaspalan Gg. Lestari RT.21 Kel.Timbau	RT.21, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
230	Semenisasi Drainase Jalan Naga Indah RT.21 Kel.Timbau	RT.21, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
231	Semenisasi Lanjutan Gang Tower/Blok C RT.21 Kel.Timbau	RT.21, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
232	Semenisasi Selokan Masjid Al. Anshor RT.22 Kel.Timbau	RT.22, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
233	lanjutan Semenisasi Gang Bakti Kuburan Khatolik RT.24 Timbau	RT.24, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
234	Pembuatan Jalan dan Pengerasan dari RT.27 ke gg.9 Kel.Timbau	RT.27, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
235	Pembuatan badan jalan tembus gg Amal ke gg Barokah Kel.Timbau	RT.27, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
236	Peningkatan Jalan Gang Amanah RT.27 Kel.Timbau	RT.27, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
				Dilimpahkan			Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
237	Peningkatan badan Jalan Tembus dari RT.27 ke RT.03 Kel.Timbau	RT.27, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
238	Lanjutan Peningkatan Jalan Tembus RT.27 ke RT.21 Kel.Timbau	RT.27, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
239	Pembuatan Gorong-gorong Gg.1 Jl.Putri Kencana Kel.Timbau	RT.28, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
240	Pengurukan Gang 3 Jl.Kencana Ungu Kel.Timbau	RT.28, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
241	Pembuatan Gorong-gorong RT.30 Kel.Timbau	RT.30, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
242	Penurapan Blok B RT. 31 Kel.Timbau	RT.31, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
243	Lanjutan Peningkatan Jalan Blok D RT. 31 Kel.Timbau	RT.31, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
244	Lanjutan Peningkatan Jalan Blok E RT. 31 Kel.Timbau	RT.31, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
245	Lanjutan Peningkatan Jalan Blok F RT. 31 Kel.Timbau	RT.31, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
246	lanjutan pembuatan gorong-gorong di jl.wolter monginsidi 2 RT.32 Kel.Timbau	RT.32, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
							Kecamatan Tenggarong
247	Semenisasi Gang Solo RT.34 Kel.Timbau	RT.34, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
248	Semenisasi Gang Langgar RT.34 Kel.Timbau	RT.34, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
249	Lanjutan Semenisasi Jalan Gang Gunung Ilas Permai 1 Kel.Timbau	RT.36, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
250	Turap Parit Jalan Gang Gunung Ilas Permai 3 Kel.Timbau	RT.36, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
251	Lanjutan Semenisasi Gang Sepakat Kel.Timbau	RT.36, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
252	Belum tersedianya akses jalan yang memadai sebagai sarana prasarana masyarakat	Jalan Kemuning II RT.07 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
253	Belum tersedianya akses jalan yang memadai sebagai sarana prasarana masyarakat	Jalan Rambutan RT.04 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong , Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
254	Belum tersedianya akses jalan yang memadai sebagai sarana prasarana masyarakat	Jalan Tegal Arum RT.01 Kel. Bukit BiruKecamatan Tenggarong , Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
255	Pembuatan Gapura jalan Durian Manok dan Jalan Azzahra RT.11 Kel.Timbau	RT.11, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Fasilitasi sarana prasarana desa
256	Normalisasi Dan Penurapan Parit Limbah RT. 5 Kelurahan Maluhu	Jl. Bontang RT. 5 Kelurahan Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
257	Pembuatan Gapura Gang Bakut Puskesmas Rapak mahang RT.14 Kel.Timbau	RT.14, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Fasilitasi sarana prasarana desa
258	Pembangunan dan Taman bermain anak di Lingkungan RT.16 Kel.Timbau	RT.16, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Fasilitasi sarana prasarana desa
259	Pembuatan Pintu Gerbang RT.22 Kel.Timbau	RT.22, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Fasilitasi sarana prasarana desa
260	Normalisasi Dan Penurapan Parit Induk RT.05	Jl. Bontang RT. 05 Kel. Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
261	Rehabilitasi Pos kamling RT.22 Kel.Timbau	RT.22, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Pos Keamanan di Kecamatan Tenggarong
262	JALAN RUSAK	Jalan Merpati RT.06 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong , Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Biru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
263	Pembuatan Bak Sampah Jalan Naga Indah Kel.Timbau	RT.36, Kab. Kutai Kartanegara	Timbau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembuatan Tempat Sampah Penampungan Sementara di Kecamatan Tenggarong
264	Pembuatan Pondasi badan jalan Gang 2 RT. 3 Kel. Maluhu	Jl. Bontang RT. 3 Kel. Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
265	Pembuatan Parit dan gorong gorong RT.3	Jl. Bontang RT. 3 Kel. Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
266	Pembuatan Parit Jalan RT. 3 Kel. Maluhu	Jl. Bontang RT. 3 Kel. Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
267	Pembuatan parit perbatasan RT. 3 dan RT. 4 Kel. Maluhu	Jl. Bontang RT. 3 Kel. Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
268	Pembuatan parit gang dewi RT. 3 Kel. Maluhu	Gang dewi RT. 3 Kel. Maluhu, Kab. Kutai	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang	1 Laporan	200.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
		Kartanegara		Dilimpahkan			Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
269	Pengadaan Tiang lampu dan lampu tenaga surya (lampu jalan) RT. 14 Kel. Maluhu	Jl. Long Apari RT. 14 Kel. Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	850.000.000	Penyediaan perlengkapan Jalan (LPJU)
270	Normalisasi dan penurapan parit RT. 14 Kel. Maluhu	Jl. Long apari RT. 14 Kel. Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
271	Semenisasi Pengecoran Jalan Darussalam RT.14	Jl. Darussalam RT. 14 Kel. Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)
272	Belum adanya Akses Jalan Sehingga Menghambat Aktifitas Lalu Lintas Warga (Pembuatan Badan Jalan Gang. Siti Hasanah 1, Jl. Aji Imbut RT. 1, Kel. Baru, Kec. Tenggarong)	Jl. Aji Imbut RT.01 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
273	Kondisi Jalan Yang Rusak Mengakibatkan aktifitas lalu lintas jalan terganggu (Pengaspalan jalan Gang HJ. Salamah RT. 01 Kel. Baru, Kec. Tenggarong)	Jl. Am. Sangaji Gg. Hj. Salamah RT.01 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
274	Kondisi Parit Yang Kecil dan rusak menyebabkan sebagian air mengalir ke jalan (Perbaikan Parit di Gang. Siti Hasanah RT. 01 Kel. Baru Kec. Tenggarong)	Jl. Aji Imbut Gg. Siti Hasanah 1 RT.01 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
275	Belum Adanya Badan Jalan Menyebabkan Tidak Adanya Akses Warga Untuk Membangunan Rumah (Pembuatan Badan Jalan RT.2 jln. Arifin, Kel. Baru, Kec. Tenggarong)	Jl. Aji Imbut Gg. Arifin RT.02 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
276	Belum Selesainya Pembangunan Jalan Menyebabkan Aktifitas Lalu Lintas Warga Terhambat (Lanjutan Semenisasi Jalan Gang. Matusin, RT. 3,Jl. AM. Sangaji, Kel. Baru, Kec. Tenggarong)	Jl. AM. Sangaji Gg. Matusin RT.03 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
277	Belum adanya Pembangunan Parit drainase sebagai tempat aliran air hujan menyebabkan tidak maksimalnya penanggulangan banjir (Pembangunan Parit Drainase Gang.4 Jl. AM.	Jl. AM. Sangaji Gg.4 RT.04 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
	Sangaji RT.4, Kel. Baru, Kec. Tenggarong)						
278	Jalan Yang Rusak Menyebabkan Aktifitas Lalu Lintas Warga Terhambat (Pengaspalan Jalan Gang. 5, Jl. AM. Sangaji, RT. 5, Kel. Baru, Kec. Tenggarong)	Jl. AM. Sangaji Gg.5 RT.05 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
279	Jalan Yang Rusak Menyebabkan Aktifitas Lalu Lintas Warga Terhambat (Peningkatan Jalan Gang.6, Jl. AM. Sangaji, RT. 6, Kel. Baru. Kec. tenggarong)	Jl. AM. Sangaji Gg.6 RT.06 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
280	Belum Adanya Badan Jalan Menyebabkan Tidak Adanya Akses Warga Untuk Membangunan Rumah (Pembuatan Badan Jalan dan Penurapan Gang Durian, Jl. Akhmad Dahlan RT. 7, Kel. Baru, Kec. Tenggarong)	Jl. Akhmad Dahlan Gg. Durian RT.07 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
281	Belum adanya Parit drainase sebagai tempat aliran air hujan menyebabkan tidak maksimalnya penanggulangan banjir (Lanjutan Pembuatan Parit Drainase Gang. Rumbia RT.8, Kel. Baru, Kec. Tenggarong)	Jl. AM. Sangaji Gg. Rumbia RT.08 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)
282	Jalan Yang Rusak Menyebabkan Aktifitas Lalu Lintas Warga Terhambat (Peningkatan Jalan Gang. Obos, RT.8, Kel. Baru, Kec. Tenggarong)	Jl. AM. Sangaji Gg. Obos RT.08 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
283	Belum Adanya Kelanjutan Pembangunan Jalan Menyebabkan Akses Jalan AM. Sangaji Yang Terintegrasi ke Jalan Kejawi Permai Tidak Dapat Dilalui (Semenisasi Jalan Gang. 10, RT.9, Jl. AM. Sangaji, Kel. Baru, Kec. Tenggarong)	Jl. AM. Sangaji Gg.10 RT.09 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
284	Jalan Yang Rusak Menyebabkan Aktifitas Lalu Lintas Warga Terganggu (Pengaspalan Jalan Gang 9 RT. 09 Kel. Baru, Kec. Tenggarong)	Jl. AM. Sangaji Gg. 9 RT. 09 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
285	Kondisi Box Curvet yang tidak memadai dan menggagu aktivitas pengguna jalan (Perbaikan Box Curvet di Jln. Kejawi Permai)	Jl. Kejawi Permai RT.09 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
286	Jalan Yang Rusak Menyebabkan Aktifitas Lalu Lintas Warga Terhambat (Peningkatan Jalan dan Penambahan Semenisasi Bagian Kanan Jalan Kejawi Permai Kel. Baru. Kec. Tenggarong)	Jl. Kejawi Permai RT.09 RT. 10 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
287	Kondisi Parit / Drainase yang rusak akan menyebabkan terhambatnya aliran air (Peningkatan/ perbaikan Drainase / Parit Jl. Sukmawira RT. 10 Kel. Baru Kec. Tenggarong)	Jl. Sukmawira RT. 10 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
288	Belum Adanya Semenisasi Jalan Menyebabkan Jalan Yang Masih Tanah Bila terjadi Hujan Menjadi Becek dan Menghambat Aktifitas Warga (Pengerasan dan Semenisasi Jalan Tambak Rel. 17, RT.11 Kel. Baru, Kec. Tenggarong)	Jl. Tambak rel 17 RT.11 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
289	Belum Adanya Lanjutan Semenisasi Jalan Menyebabkan Jalan Yang Masih Tanah Bila terjadi Hujan Menjadi Becek dan Menghambat Aktifitas Warga pada saat ada Pemakaman (Lanjutan Semenisasi Jalan Menuju Kuburan Tambak Rel RT. 11 Kel. Baru Kec. Tenggarong)	Jl. Tambak Rel RT.11 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
290	Belum Adanya Semenisasi Jalan Menyebabkan Jalan Yang Masih Tanah Bila terjadi Hujan Menjadi Becek dan Menghambat Aktifitas Warga (Lanjutan Semenisasi Jalan Tambak rel. 12, RT.11, Kel. Baru, Kec. Tenggarong)	Jl. Tambak Rel 12 RT. 11 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
291	Diharapkan Adanya Pembangunan Turap di Area Masjid AL-Mujahidin Untuk Mencegah Terjadinya Longsor (Penurapan Beton Area Masjid AL- Mujahidin Tambak Rel, RT.11, Kel. Baru, Kec. Tenggarong)	Jl. Tambak Rel RT. 11 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
292	Banyaknya Lubang Di Jalan Menyebabkan Aktifitas Lalu Lintas Warga Terganggu (Peningkatan Jalan Tambak Rel. 10, RT.11, Kel. Baru, Kec. Tenggarong)	Jl. Tambak Rel 10 RT. 11 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
293	Kondisi Parit Yang Sudah Rusak Menyebabkan Aliran Air Hujan Tidak Dapat Berjalan Dengan Lancar (Perbaikan Parit Di Lingkungan Perum Tambak Rel, RT.11, Kel. Baru, Kec. Tenggarong)	Jl. Tambak Rel RT.11 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
294	Belum Adanya Semenisasi Jalan Menyebabkan Jalan Yang Masih Tanah Bila Hujan Menghambat Aktifitas lalu lintas jalan Warga Setempat (Semenisasi Jalan Gang Bersama 2 Tambak Rel Dalam RT.11, Kel. Baru, Kec. Tenggarong)	Jl. Tambak Rel Dalam Gg. Bersama 2 RT.11 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
295	Belum Selesainya Pembangunan Jalan Menyebabkan Aktifitas Lalu Lintas Warga Terhambat (Lanjutan Semenisasi Jalan Poros Tambak Rel Dalam RT. 11, Kel. Baru, Kec. Tenggarong)	Jl. Tambak Rel Dalam RT.11 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
296	Belum Terselesaikannya seluruh penurapan untuk mencegah terjadinya longsor di pemakaman (Pembuatan Teras Siring Beton Batu Brojong di Area Tebing TPU Muslimin Jl. Tambak Rel Dalam RT. 11 Kel. Baru Kec. Tenggarong)	Jl. Tambak Rel Dalam RT.11 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
297	Mengingat Kondisi Kemiringan Jalan Tidak memungkinkan untuk di lakukan peningkatan semenisasi peningkatan semenisasi (badan jalan akan menjadi lebih tinggi dan bertambah curam) (Peningkatan Jalan (Pengaspalan) Jalan Blok Perum Tambak Rel RT. 11 Kel. Baru Kec. Tenggarong)	Jl. Tambak Rel RT.11 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
298	Banyaknya Lubang Di Jalan Menyebabkan Aktifitas Lalu Lintas Warga Terganggu (Pengaspalan dengan Hotmix Jalan Mangga RT. 12 Kel. Baru, Kec. Tenggarong)	Jl. Akhmad Dahlan GG. Mangga 1,2 3 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
299	Parit Yang Kecil dan Rusak Menyebabkan Tidak Dapat Menampung Air Hujan Sehingga Menyebabkan Banjir (Rehabilitasi/Pembuatan Parit dan Gorong-Gorong di Jalan Mangga RT. 12, Kel. Baru Kec. tenggarong)	Jl. Kejawi Pemai Gg. Mangga 1,2,3 RT.12 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
300	Banyaknya Kerusakan Jalan Menyebabkan Terganggunya akses jalan bagi masyarakat (Lanjutan peningkatan Jalan Syarifudin 2 Tambak Rel RT. 14, Kel. Baru Kec. Tenggarong)	Jl. Tambak Rel Gg. Syarifuddin 2 RT.14 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
301	Banyaknya Kerusakan Jalan Menyebabkan Terganggunya akses jalan bagi masyarakat (Peningkatan Pengaspalan Jalan syarifudin 2 Tambak Rel RT. 14, Kel. Baru, Kec. Tenggarong)	Jl. Tambak Rel Gg. Syarifuddin 2 RT.14 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
302	Banyaknya Kerusakan Jalan Menyebabkan Terganggunya akses jalan bagi masyarakat (Peningkatan Pengaspalan Jalan syarifudin 1 Tambak Rel RT. 14, Kel. Baru, Kec. Tenggarong)	Jl. Tambak Rel Gg. Syarifuddin 1 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
303	Belum Adanya Parit drainase sebagai tempat aliran air hujan menyebabkan Air Berlimpah Ke Jalan (Pembuatan Parit Gang Iksan Tambak Rel RT. 14 Kel. Baru, Kec. Tenggarong)	Jl. Tambak Rel Gg. Iksan RT.14 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)
304	Belum Adanya Lanjutan Semenisai Jalan Menyebabkan Aktifitas Lalu Lintas Warga Terhambat (Lanjutan Semenisasi Jalan Gang. Gusti Hasmah 3 Jalan Tambak Rel. RT.14, Kel. Baru, Kec. Tenggarong)	Jl. Tambak Rel Gg. Gusti Hasmah 3 RT.14 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
305	Belum adanya Akses Jalan Sehingga Menghambat Aktifitas Lalu Lintas Warga (Peningkatan Badan Jalan Blok AC Tambak Rel, RT.14, Kel. Baru, Kec. Tenggarong)	Jl. Tambak Rel Blok AC RT.14 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
306	Belum adanya Akses Jalan Sehingga Menghambat Aktifitas Lalu Lintas Warga (Pembuatan Badan Jalan jl. Aisyah, Tambak Rel, RT. 14, Kel. Baru, Kec. Tenggarong)	Jl. Tambak Rel Gg. Aisyah RT.14 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
307	Kondisi Semen Parit Yang Sudah Rusak Menyebabkan Aliran Air Hujan Tidak Dapat Berjalan Dengan Lancar Mengakibatkan Banjir (Rehabilitasi/Perbaikan Parit Jalan Tambak Rel RT.14, Kel. Baru, Kec. Tenggarong)	Jl. Tambak Rel RT.14 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
308	Belum Adanya Pembangunan Jalan yang terintegrasi gang Gusti Hasmah 1,2,3,4 menyebabkan Masyarakat Jalan di tanah Yang berlumpur Bila Hujan Turun (Semenisasi Jalan Gang. Gusti Hasmah 1,2,3,4 Jalan Tambak Rel RT. 14, Kel. Baru, Kec. Tenggarong)	Jl. Tambak Rel Gg. Gusti Hasmah 1,2,3,4 RT.14 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
309	Belum Adanya Lanjutan Pembangunan Jalan menyebabkan Masyarakat Jalan di tanah Yang berlumpur Bila Hujan Turun (Lanjutan Semenisasi Jl. Aisyah Tambak Rel RT. 14, Kel. Baru Kec. Tenggarong)	Jl. Tambak Rel Gg. Aisyah RT.14 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
310	Jalan Yang Rusak Menyebabkan Aktifitas Lalu Lintas Warga Terhambat (Peningkatan Jalan Gang. Alya, RT.15 Jl. Djafar Seman, Kel. Baru, Kec. Tenggarong)	Jl. Djafar Seman Gg. Alya RT.15 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
311	Parit Yang Kecil dan Rusak Menyebabkan Tidak Dapat Menampung Air Hujan Sehingga Menyebabkan air tergenang ke jalan (Rehabilitas / Perbaikan Parit Gang. Alya, RT.16 jl. Djafar seman Kel. Baru Kec. Tenggarong)	Jl. Djafar Seman Gg. Alya RT.16 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
312	Belum Adanya Badan Jalan Menyebabkan Tidak Adanya Akses Warga Untuk Membangunan Rumah (Lanjutan Pembuatan Badan Jalan Gang. Matusin, Jl. AM. Sangaji RT.3, Kel. Baru, Kec. Tenggarong)	Jl. AM. Sangaji RT.03 Gg. Matusin Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
313	Semenisasi halaman Pusban,, kondisi halaman yang masih berupa tanah sehingga menyulitkan warga saat parkir untuk berobat	Jl. Etam Rt. 04, Kab. Kutai Kartanegara	Jahab	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
314	Bantuan Pengadaan Ternak Kerbau, dengan adanya kelompok tani masayarakat bersama sama meningkatkan peternakan yang kurang aktif	Jl. Gunug Triyu Rt. 05, Kab. Kutai Kartanegara	Jahab	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	300.000.000	Pengadaan bibit Ternak Kerbau
315	Lanjutan pengurukan jalan baru sawah, tembusan RT.19 jalan sudah tidak layak	Loa Tebu RT. 19 , Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
316	1. Gang belum ada 2. Pembangunan gang memerlukan turap setinggi 1,5 meter 3. Gang perlu diuruk	JL.Ahmad Dahlan 1 RT.009, Kab. Kutai Kartanegara	Sukarame	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
317	Peningkatan dan Semenisasi Jl. Jumet, kondisi jalan yang rusak serta berlubang	JL. Etam RT. 12, Kab. Kutai Kartanegara	Jahab	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
318	Pembangunan Jembatan Jl. Jumet, kondisi jembatan yang kurang memadai	JL. Etam RT. 12, Kab. Kutai Kartanegara	Jahab	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
				Lain yang Dilimpahkan			Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
319	Rehab Gang H. Jailani Jalan Rusak Berlubang	Jl. Jaya Mangku RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
320	Pelebaran Gang Melati pengurukan dan semenisasi Jalan Rusak	Jl. Jaya Mangku RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
321	Turap samping kiri gang bustamam sangat perlu dibangun	Jl. Jaya Mangku RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
322	Renovasi/ Pembutan Gorong- Gorong untuk mengatasi banjir	Loa Tebu RT. 02, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
323	Peningkatan Pengerasan Jalan Baru Perlunya jalan baru karena untuk menopang aktivitas kerja warga	Loa Tebu RT 13 S/D 05 , Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
324	Semenisasi Jalan Perum Citra Kumala Jl. Selimpat RT.17 Kel. Panji	Jl. Selimpat RT.17 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
325	Pembuatan Turap kayu ulin pada parit di Jl. Tenis lapangan GG.1 Kel. Panji	Jl. Tenis lapangan GG.1 Kel. Panji , Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
326	Pembangunan Gudang Press dan Teras Bank Sampah Kel. Panji	Jl. Rondong Demang RT.10 Kel.panji, Kab. Kutai Kartanegara	Panji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembuatan Tempat Sampah Penampungan Sementara di Kecamatan Tenggarong
327	Pembuatan Badan Jalan Blok 1 Gang 4 RT. 1 Kelurahan Maluhu	Jalan Sangkulirang Gang 4 RT. 1 Kelurahan Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
328	Pembuatan parit Gg. Kopi RT. 7 Kel. Maluhu	Gg. Kopi RT. 7 Kel. Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
329	Lanjutan Jembatan Gg. Jeruk RT. 7 Kel. Maluhu	Gg. Jeruk RT. 7 Kel. Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
330	Lanjutan Semenisasi Gg. Kelengkeng RT. 7 Kel. Maluhu	Gg. Kelengkeng RT. 7 Kel. Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
331	Turap Tinggi 4 M Panjang 100 M RT. 8 Kel. Maluhu	Jalan Anggana RT. 8 Kel. Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
332	Pembuatan Jalan Inspeksi Jalan Mualaf 2 DAS Sungai Tenggarong RT. 20 Kel. Maluhu	Jalan Mualaf RT. 20 Kel. Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1.000.000.000	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)
333	Lanjutan Urukan Gg. Ramadan RT. 8 Kel. Maluhu	Gg. Ramadan Jalan Anggana RT. 8 Kel. Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
334	Lanjutan semenisasi Usaha Tani 2 RT. 8 Kel. Maluhu	Lanjutan semenisasi Usaha Tani 2 Jalan Anggana RT. 8 Kel. Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
335	Pembuatan Gorong Gorong RT. 9 Kel. Maluhu	Jalan Masjid RT. 9 Kel. Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
336	Peningkatan Jln. Gg Aminah RT. 10 Kel. Maluhu	Jln. Gg Aminah RT. 10 Kel. Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
337	Peningkatan Jln. Gg Jambu RT. 10 Kel. Maluhu	Jln. Melak Gg Jambu RT. 10 Kel. Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
338	Pengaspalan Gg Langgar RT. 10 Kel. Maluhu	Jalan Melak Gg Langgar RT. 10 Kel. Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
339	Peningkatan Jalan Sultan Sulaiman Jalan Berlubang	Jl. Jaya MangkuRT. 03, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
				Lain yang Dilimpahkan			Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
340	Semenisasi gang Akhmad	Jl. Jaya MangkuRT. 03, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
341	Semenisasi Gg. Amanat Jalan Sudah Rusak	Jl. Jaya MangkuRT. 04, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
342	Rehab gang keminting Jalan Berlubang	Loa Tebu RT. 05, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
343	Semenisasi gang bubuhan Jalan Rusak	Loa Tebu RT. 05, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
344	Peningkatan Jl. Gerbang dayaku Jalan Sudah Tidak Layak di gunakan	Loa Tebu RT . 06, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
345	Drainase Gg. Cempaka Sering Terjadi Banjir Kalau Hujan	Loa Tebu RT .07, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
346	Peningkatan jalan danau biru Jalan Rusak	Loa Tebu RT. 07, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
347	Lanjutan Semenisasi Gg. Family RT. 12 Kelurahan Maluhu	Jalan Long Bagun Gg. Family RT. 12 Kelurahan Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
348	Semenisasi gang ayahfa Jalan Rusak	Loa Tebu RT. 08, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
349	Parit Lingkungan RT. 12 Kelurahan Maluhu	Jalan Long Bagun RT. 12 Kelurahan Maluhu,	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang	1 Laporan	20.000.000	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
		Kab. Kutai Kartanegara		Dilimpahkan			
350	Peningkatan JL.Baneran lebar 8 meter panjang 250	RT.009, Kab. Kutai Kartanegara	Sukarame	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	20.000.000	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)
351	Semenisasi Jln Bengkeris 1 RT. 13 Kelurahan Maluhu	Jln Bengkeris 1 RT. 13 Kelurahan Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
352	Semenisasi Jln Bengkeris 2 RT. 13 Kelurahan Maluhu	Jln Bengkeris 2 RT. 13 Kelurahan Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
353	Semenisasi dan Parit Gg. Mega RT. 2 Kel. Maluhu	Mega RT. 2 Kel. Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
354	Semenisasi Gg. Al- Amin RT. 2 Kel. Maluhu	Gg. Al- Amin RT. 2 Kel. Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
355	Lanjutan semenisasi Gg. Pandawa RT. 2 Kel. Maluhu	Gg. Pandawa RT. 2 Kel. Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
356	Semenisasi dan Parit Gg. Margo Rukun RT. 2 Kel. Maluhu	Gg. Margo Rukun RT. 2 Kel. Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
357	Semenisasi Gg Pandawa 2 RT.02	Gg Pandawa 2 RT.02, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
358	Semenisasi Jalan Sidodadi RT. 20 Kel. Maluhu	Jalan Sidodadi RT. 20 Kel. Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)
359	Normalisasi dan pembuatan Parit Induk RT 02 Kel. Maluhu	Jalan Sangkulirang RT. 2, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
360	Pembuatan Gorong-gorong dan Parit Depan Vila	Jalan Sangkulirang RT. 2 Kel. Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
361	PENINGKATAN JALAN ARJUNA RT. 13 KELURAHAN MALUHU (JALAN RUSAK)	Jalan Arjuna RT. 13 Kel. Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1.380.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
362	Semenisasi Jalan Kuburan RT. 5 Kelurahan Maluhu (Jalan menuju kuburan rusak dan berlubang)	Jalan Kuburan RT. 5 Kelurahan Maluhu (Jalan menuju kuburan rusak dan berlubang), Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
363	PENINGKATAN JALAN CISADANE RT. 18 KELURAHAN MALUHU (JALAN RUSAK)	JALAN CISADANE RT. 18 KELURAHAN MALUHU, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
364	PENGASPALAN JALAN RT 24 KEL. MALUHU	RT 24 KEL. MALUHU, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
365	NORMALISASI PARIT INDUK RT 24 MALUHU 2024	RT 24 MALUHU 2024, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
366	Perlunya Perlengkapan Pemadam untuk memadamkan api apabila terjadi kebakaran	Jl Danau Melintang RT.24 Kelurahan Melayu (Pengadaan Mesin Pemadam Kebakaran (1 Unit), Selang Pemadam (15 Buah) dan Kepala Kiwi Pemadam RT. 24 Kelurahan Melayu) , Kab. Kutai Kartanegara	Melayu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	100.000.000	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Mesin Pompa, Selang, Nozle, Conection, baju tahan panas, sepatu, helm) (Karhutla)
367	Belum Adanya Semenisai Jalan Menyebabkan Aktifitas Lalu Lintas Warga Terhambat (Semenisasi Jalan Gang RT.13 Terintegrasi ke RT. 16, Kel. Baru, Kec. Tenggarong)	Jl. AM. Sangaji RT.13 dan RT.16 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
368	Belum Adanya Semenisai Jalan Menyebabkan Aktifitas Lalu Lintas Warga Terhambat (Semenisasi Jalan Tambak Rel Dalam RT.14, Kel. Baru, Kec.	Jl. Tambak Rel Dalam RT.14 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
	Tenggarong)	Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru, Kab. Kutai Kartanegara					Tenggarong
369	Belum Selesainya Pembangunan Jembatan Menyebabkan Aktifitas Lalu Lintas Warga Terhambat (Lanjutan Pembangunan Jembatan Ulin Gang. Damai, Jl. AM. Sangaji RT.7, Kel. Baru, Kec. tenggarong)	Jl. AM. Sangaji Gg. Damai RT.07 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru, Kab. Kutai Kartanegara	Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
370	Pembangunan Turap Beton Dilingkungan Jalan Mangkuraja RT. 22 Kelurahan Loa Ipuh	RT. 22, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Ipuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
371	Pelebaran Gorong- gorong Depan Rumah Udin Jabau mungurangi genangan air ketika hujan	Loa Tebu RT. 10, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
372	Rehap Jembatan (Plat Dacker) sudah rusak	Gang teluk bahagia RT. 11, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
373	Jalan rias bengkinang semenisasi Jalan Rusak	Bengkinng RT . 11, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
374	Perlunya Alat Pemadam pada RT Tersebut	Jl. Gunung Pegat RT. 35 Kelurahan Melayu (Pengadaan Hydrant PDAM (Untuk PMK) Jl. Gunung Pegat RT. 35 Kelurahan Melayu), Kab. Kutai Kartanegara	Melayu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	100.000.000	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Mesin Pompa, Selang, Nozle, Conection, baju tahan panas, sepatu, helm) (Karhutla)
375	Perlunya Alat Pemadam pada RT Tersebut	Jl. gunung pegat RT. 35 Kelurahan Melayu (Pengadaan Mesin Pompa Alkon Pemadam Honda Tekanan Tinggi / Selang 4 Rol / Paket Lengkap Tinggal Pakai RT. 35	Melayu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	100.000.000	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Mesin Pompa, Selang, Nozle, Conection, baju tahan panas, sepatu, helm) (Karhutla)

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
		Kelurahan Melayu), Kab. Kutai Kartanegara					
376	Perlunya Pelatihan Kebakaran pada RT Tersebut	Jl. Gunung Pegat RT. 35 Kelurahan Melayu (Pelatihan / Sosialisasi Masalah Pemadaman Api RT. 35 Kelurahan Melayu), Kab. Kutai Kartanegara	Melayu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	438.000.000	Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR)
377	Lanjutan semenisasi jalan Poros Jalan Masih Banyak Lubang	Loa Tebu RT. 12, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
378	Pengerasan Badan Jalan Sultan Sulaiman Jalan Rusak	Loa Tebu RT. 14, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
379	Semenisasi Gang 4 JAlan Rusak	Loa Tebu RT . 14, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
380	Gorong- gorong jalan sultan sulaiman Untuk Mengatasi Banjir	Loa Tebu RT. 15, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
381	Gorong- gorong jalan jaya mangku Sering Terjadi Banjir	Loa Tebu RT. 16, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
382	Lanjutan Pembuatan Gang Keluarga Jalan Masih Belum Selesai	Loa Tebu RT. 18, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
383	Lanjutan Pembuatan Gang Kiwa- Kiwa Jalan Belum selesai dibangun	Loa Tebu RT. 18, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
384	Lanjutan pengurukan jalan baru sawah, tembusan RT.19 Jalan Belum Selesai Dibangun	Loa Tebu RT. 20, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
385	Pembuatan Pos Kamling Sangat Dibutuhkan Untuk Keamanan Warga	Loa Tebu RT. 19, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Pos Keamanan di Kecamatan Tenggarong
386	Semenisasi Gang 1 Jalan Masih Banyak Berlubang	Loa Tebu RT .19, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Tebu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
387	Bantuan Pengadaan Bibit Kambing Kelompok Tani 60 ekor	jl. Etam RT. 20, Kab. Kutai Kartanegara	Jahab	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	150.000.000	Pengadaan bibit Ternak Kambing
388	Bantuan Pengadaan Bibit Buah Buahan	Jl Etam Gg. Kenyah RT. 20, Kab. Kutai Kartanegara	Jahab	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	24.991.000	Pengadaan Bibit/Tanaman untuk pemulihan lahan jenis Fast Growing (Tanaman yang cepat tumbuh(tanaman buah-buahan, tumbuhan Sengon, pinus, eucalyptus, Acasia crassicarpa, pulai, Alaban, sungkai, ketapang, lamtoro, trembesi, kaliandra)
389	Pengadaan Alat Kebakaran Kelurahan, LPM	JL. Etam RT. 18, Kab. Kutai Kartanegara	Jahab	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	100.000.000	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Mesin Pompa, Selang, Nozle, Conection, baju tahan panas, sepatu, helm) (Karhutla)
390	Semenisasi halaman Kantor Kelurahan Jahab	Kantor Kelurahan Jahab, Kab. Kutai Kartanegara	Jahab	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
391	Pembuatan Saluran Air Tersier Kelompok Tani (Gapoktan)	Kelurahan Jahab, Kab. Kutai Kartanegara	Jahab	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
392	Perbaikan Jalan Triyu 2 Kelurahan Jahab	Kelurahan Jahab, Kab. Kutai Kartanegara	Jahab	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
393	Pengadaan Benih Holtikultura (Durian, Lai dan Manggis)	JL. gerbang dayaku, Kab. Kutai Kartanegara	Rampak Lambur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	24.991.000	Pengadaan Bibit/Tanaman untuk pemulihan lahan jenis Fast Growing (Tanaman yang cepat tumbuh(tanaman buah-buahan, tumbuhan Sengon, pinus, eucalyptus, Acasia crassicarpa, pulai, Alaban, sungkai, ketapang, lamtoro, trembesi, kaliandra)
394	Lanjutan Semenisasi Jln. Sidodadi RT. 15 Kelurahan Maluhu	Jln. Sidodadi RT. 15 Kelurahan Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
395	Semenisasi Jalan Al- Ma'ruf RT. 15 Kelurahan Maluhu	Jalan Al- Ma'ruf RT. 15 Kelurahan Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
396	Penurapan Jln. Usaha Tani RT. 15 Kelurahan Maluhu	Jln. Usaha Tani RT. 15 Kelurahan Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
397	Peningkatan Jln. Nusantara RT. 16 Kelurahan Maluhu	Jln. Nusantara RT. 16 Kelurahan Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
398	Peningkatan Gg. Sido Rukun RT. 16 Kelurahan Maluhu	Gg. Sido Rukun RT. 16 Kelurahan Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
399	Pembangunan Jembatan Jln. Syamsu Hariyanto RT. 17 Kelurahan Maluhu	Jln. Syamsu Hariyanto RT. 17 Kelurahan Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
400	Peningkatan Jln. Syamsu Hariyanto RT. 17 Kelurahan Maluhu	Jln. Syamsu Hariyanto RT. 17 Kelurahan Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
401	Parit dan Turap Semenisasi Gg. Lapangan Jln, Citarum RT. 17 Kelurahan Maluhu	Gg. Lapangan Jln, Citarum RT. 17 Kelurahan Maluhu, Kab. Kutai	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
		Kartanegara					
402	Lanjutan Semenisasi Jln, Cisadani RT. 18 Kelurahan Maluhu	Jln, Cisadani RT. 18 Kelurahan Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
403	Pembuatan Badan Jln. Waduk Permai RT. 18 Kelurahan Maluhu	Jln. Waduk Permai RT. 18 Kelurahan Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
404	Pengadaan bibit ternak kambing 30 Ekor	Jl. gerbang dayaku, Kab. Kutai Kartanegara	Rampak Lambur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	150.000.000	Pengadaan bibit Ternak Kambing
405	Lanjutan Semenisasi Gg. Swadaya RT. 19 Kelurahan Maluhu	Gg. Swadaya RT. 19 Kelurahan Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
406	Semenisasi Gg. Kenangan 2 RT. 19 Kelurahan Maluhu	Gg. Kenangan 2 RT. 19 Kelurahan Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
407	Turapan Semenisasi Jln. Rojo lele RT. 20 Kelurahan Maluhu	Jln. Rojo lele RT. 20 Kelurahan Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
408	Pembangunan Jembatan 5 Titik RT 20 Kelurahan Maluhu	RT 20 Kelurahan Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong
409	Turap dan Pembangunan Gg. Janda RT. 20 Kelurahan Maluhu	Gg. Janda RT. 20 Kelurahan Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
410	Semenisasi Gg. Sidomulyo RT. 20 Kelurahan Maluhu	Gg. Sidomulyo RT. 20 Kelurahan Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
411	Semenisasi Gg. Pemenang RT. 20 Kelurahan Maluhu	Gg. Pemenang RT. 20 Kelurahan Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan

No	JUDUL KEGIATAN	LOKASI	KELURAHAN	INDIKATOR	VOLUME	PAGU	CATATAN
412	Pembangunan Gg. Anyelir RT. 20 Kelurahan Maluhu	Gg. Anyelir RT. 20 Kelurahan Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
413	Semenisasi Jalan Kapuas Tembus Perbatasan RT.19 dan RT. 21 Kelurahan Maluhu	Jalan Kapuas Tembus Perbatasan RT.19 dan RT. 21 Kelurahan Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
414	Penurapan Jalan Barong Tongkok RT. 21 Kelurahan Maluhu	Jalan Barong Tongkok RT. 21 Kelurahan Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
415	Pembuatan Parit di Jl. 7 Sangkulirang di Semenisasi RT. 22 Kelurahan Maluhu	Jl. 7 Sangkulirang di Semenisasi RT. 22 Kelurahan Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
416	Pembuatan Gorong- gorong di Gg. Mega RT. 22 Kelurahan Maluhu	Gg. Mega RT. 22 Kelurahan Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong
417	Pengerasan dan Semenisasidi Gg. Pribadi Yang Tembus Gg. 3 Sangkulirang RT. 22 Kelurahan Maluhu	Gg. Pribadi Yang Tembus Gg. 3 Sangkulirang RT. 22 Kelurahan Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
418	Pengaspalan di Gg, Mega RT. 22 Kelurahan Maluhu	Gg. Mega RT. 22 Kelurahan Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
419	Pengaspalan di Gg. Bakti RT. 22 Kelurahan Maluhu	Gg. Bakti RT. 22 Kelurahan Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong
420	Peningkatan Jln. Amanah RT. 23 Kelurahan Maluhu	Jln. Amanah RT. 23 Kelurahan Maluhu, Kab. Kutai Kartanegara	Maluhu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	200.000.000	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong Tahun Anggaran 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

1. Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah. Meningkatkan sarana infrastruktur sebagai akses masyarakat dalam kehidupan sehari-hari

b. Sasaran

2. Meningkatnya tertib administrasi pemerintah dan kualitas pelayanan publik dan Meningkatnya Interkoneksitas antar wilayah.

Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah.	Meningkatnya tertib administrasi pemerintah dan kualitas pelayanan publik.	Predikat Akuntabilitas Kinerja
		Pembinaan dan penyuluhan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kelurahan/Kecamatan
Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah	Meningkatnya interkoneksitas antar wilayah	Persentase jalan dengan kondisi baik

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAREAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis (Renstra) Kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 – 2026. Pada dasarnya Rencana Kerja Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025. Target kinerja mereprensentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra), Kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program dan kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

a) Pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Sangasanga diarahkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Sangasanga merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara nantinya.

b) Pencapaian SDGs.

c) Pengentasan kemiskinan. d) Pencapaian SPM.

e) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.

Jumlah Program dan Kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Tenggarong Pada Tahun 2025 adalah 5 Program, 15 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan.

b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Tenggarong sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Tenggarong yang melingkupi 2 Desa dan 12 Kelurahan.

c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Renja Kecamatan Tenggarong sebesar Rp107.920.481.032,00 yang bersumber dari APBD.

d) Terdapat beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang target dan pagu anggarannya tidak sesuai dengan Renja Perangkat Daerah, hal tersebut dikarenakan dalam berjalannya waktu terdapat hal-hal yang mengakibatkan adanya bebrapa sub kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan atau tidak sesuai dengan target sehingga perlu untuk diadakan perubahan.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai tabel berikut:*(Tabel T-C 33)*

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
KECAMATAN TENGGARONG					80.660.481.032				80.660.481.032
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	TENGGARONG	70 NILAI	51.561.558.036			70 NILAI	51.561.558.036
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TENGGARONG	7 dokumen	605.000.000			7 dokumen	605.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TENGGARONG	3 dokumen	140.000.000	APBD		3 dokumen	140.000.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	TENGGARONG	2 dokumen	5.000.000	APBD		2 dokumen	5.000.000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	TENGGARONG	2 dokumen	5.000.000	APBD		2 dokumen	5.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TENGGARONG	1 laporan	70.000.000	APBD		1 laporan	70.000.000

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TENGGARONG	12 laporan	60.000.000	APBD		12 laporan	60.000.000
7.01.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	TENGGARONG	200 data	300.000.000	APBD		200 data	300.000.000
7.01.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TENGGARONG	25 Berita Acara	25.000.000	APBD		25 Berita Acara	25.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	TENGGARONG	36 laporan	43.508.730.429			36 laporan	43.508.730.429
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	TENGGARONG	350 Orang/ bulan	42.580.043.145	APBD		350 Orang/bulan	42.580.043.145
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	TENGGARONG	1 Laporan	25.000.000	APBD		1 Laporan	25.000.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	TENGGARONG	12 Laporan	878.687.284	APBD		12 Laporan	878.687.284

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3) Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	TENGGARONG	1 Laporan	25.000.000	APBD		1 Laporan	25.000.000
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	TENGGARONG	1 unit	276.604.584			1 unit	276.604.584
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	TENGGARONG	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	25.000.000
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	TENGGARONG	1 Dokumen	150.000.000	APBD		1 Dokumen	150.000.000
7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	TENGGARONG	1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	50.000.000
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	TENGGARONG	1 Laporan	51.604.584	APBD		1 Laporan	51.604.584
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	TENGGARONG	1 orang	20.000.000			1 orang	20.000.000

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	TENGGARONG	1 Paket	20.000.000	APBD		1 Paket	20.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	TENGGARONG	1 unit	1.400.348.405			1 unit	1.400.348.405
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	TENGGARONG	13 Paket	52.999.994	APBD		13 Paket	52.999.994
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	TENGGARONG	25 Paket	239.135.000	APBD		25 Paket	239.135.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	TENGGARONG	5 Paket	8.000.000	APBD		5 Paket	8.000.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	TENGGARONG	73 Paket	516.019.457	APBD		73 Paket	516.019.457
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	TENGGARONG	3 Paket	84.193.954	APBD		3 Paket	84.193.954
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TENGGARONG	5 Laporan	350.000.000	APBD		5 Laporan	350.000.000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	TENGGARONG	1 Dokumen	150.000.000	APBD		1 Dokumen	150.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	TENGGARONG	12 Unit	543.000.000			12 Unit	543.000.000

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	TENGGARONG	6 Unit	180.000.000	APBD		6 Unit	180.000.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	TENGGARONG	1 Unit	10.000.000	APBD		1 Unit	10.000.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	TENGGARONG	5 Unit	203.000.000	APBD		5 Unit	203.000.000
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	TENGGARONG	12 Unit	150.000.000	APBD		12 Unit	150.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	TENGGARONG	12 bulan	4.285.639.914			12 bulan	4.285.639.914
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	TENGGARONG	1 Laporan	4.510.000	APBD		1 Laporan	4.510.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	TENGGARONG	12 Laporan	720.317.280	APBD		12 Laporan	720.317.280
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	TENGGARONG	12 Laporan	20.068.998	APBD		12 Laporan	20.068.998
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	TENGGARONG	206 Laporan	3.540.743.636	APBD		206 Laporan	3.540.743.636

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	TENGGARONG	35 unit	922.234.704			35 unit	922.234.704
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	TENGGARONG	16 unit	84.400.000	APBD		16 unit	84.400.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	TENGGARONG	16 unit	338.834.704	APBD		16 unit	338.834.704
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	TENGGARONG	7 unit	86.000.000	APBD		7 unit	86.000.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	TENGGARONG	1 unit	375.000.000	APBD		1 unit	375.000.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	TENGGARONG	1 unit	38.000.000	APBD		1 unit	38.000.000
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	TENGGARONG	80 Persentase	14.070.000.000			80 Persentase	14.070.000.000

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	TENGGARONG	2 Kegiatan	450.000.000			2 Kegiatan	450.000.000
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	TENGGARONG	2 Laporan	150.000.000	APBD		2 Laporan	150.000.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	TENGGARONG	1 Dokumen	300.000.000	APBD		1 Dokumen	300.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	TENGGARONG	1 SPM	50.000.000			1 SPM	50.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	TENGGARONG	1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	50.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	TENGGARONG	2 Kegiatan	13.570.000.000			2 Kegiatan	13.570.000.000

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	TENGGARONG	2 Laporan	220.000.000	APBD		2 Laporan	220.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	TENGGARONG	60 Laporan	13.350.000.000	APBD		60 Laporan	13.350.000.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	TENGGARONG	100 Presentase	14.613.922.996			100 Presentase	14.613.922.996
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	TENGGARONG	24 Kegiatan	1.572.000.000			24 Kegiatan	1.572.000.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	TENGGARONG	12 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	APBD		12 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	TENGGARONG	3 Unit	450.000.000	APBD		3 Unit	450.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	TENGGARONG	12 Pokmas / Ormas	972.000.000	APBD		12 Pokmas / Ormas	972.000.000
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	TENGGARONG	2 Laporan	50.000.000	APBD		2 Laporan	50.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	TENGGARONG	288 Lembaga	13.041.922.996			288 Lembaga	13.041.922.996

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	TENGGARONG	1045 Lembaga Kemasyarakatan	12.838.000.000	APBD		1.045 Lembaga Kemasyarakatan	12.838.000.000
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	TENGGARONG	12 Lembaga Kemasyarakatan	103.922.996	APBD		12 Lembaga Kemasyarakatan	103.922.996
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	TENGGARONG	12 Unit	100.000.000	APBD		12 Unit	100.000.000
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	TENGGARONG	80 Persentase	175.000.000			80 Persentase	175.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	TENGGARONG	2 Kegiatan	175.000.000			2 Kegiatan	175.000.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	TENGGARONG	2 Laporan	175.000.000	APBD		2 Laporan	175.000.000

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	TENGGARONG	80 Persentase	240.000.000			80 Persentase	240.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	TENGGARONG	2 Kegiatan	240.000.000			2 Kegiatan	240.000.000
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	TENGGARONG	140 Orang	240.000.000	APBD		140 Orang	240.000.000
KELURAHAN JAHAB					1.980.000.000				1.980.000.000
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	JAHAB	70 NILAI	130.000.000			70 NILAI	130.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	JAHAB	1 unit	115.000.000			1 unit	115.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	JAHAB	1 Paket	95.000.000	APBD		1 Paket	95.000.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	JAHAB	1 Paket	20.000.000	APBD		1 Paket	20.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	JAHAB	1 unit	15.000.000			1 unit	15.000.000

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	JAHAB	1 Unit	15.000.000	APBD		1 Unit	15.000.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	JAHAB	100 Presentase	1.850.000.000			100 Presentase	1.850.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	JAHAB	1 Kegiatan	750.000.000			1 Kegiatan	750.000.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	JAHAB	1 Lembaga Kemasyarakatan	17.000.000	APBD		1 Lembaga Kemasyarakatan	17.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	JAHAB	3 Unit	450.000.000	APBD		3 Unit	450.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	JAHAB	1 Pokmas / Ormas	283.000.000	APBD		1 Pokmas / Ormas	283.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	JAHAB	1 Kegiatan	1.100.000.000			1 Kegiatan	1.100.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	JAHAB	22 Lembaga Kemasyarakatan	1.100.000.000	APBD		22 Lembaga Kemasyarakatan	1.100.000.000
KELURAHAN SUKARAME					1.530.000.000				1.530.000.000

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	SUKARAME	70 NILAI	130.000.000			70 NILAI	130.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	SUKARAME	1 unit	130.000.000			1 unit	130.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	SUKARAME	1 Paket	106.000.000	APBD		1 Paket	106.000.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	SUKARAME	1 Paket	12.000.000	APBD		1 Paket	12.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SUKARAME	1 Paket	12.000.000	APBD		1 Paket	12.000.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	SUKARAME	100 Presentase	1.400.000.000			100 Presentase	1.400.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	SUKARAME	1 Kegiatan	650.000.000			1 Kegiatan	650.000.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	SUKARAME	1 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	APBD		1 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	SUKARAME	3 Unit	450.000.000	APBD		3 Unit	450.000.000

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	SUKARAME	1 Pokmas / Ormas	180.000.000	APBD		1 Pokmas / Ormas	180.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	SUKARAME	1 Kegiatan	750.000.000			1 Kegiatan	750.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	SUKARAME	13 Lembaga Kemasyarakatan	650.000.000	APBD		13 Lembaga Kemasyarakatan	650.000.000
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	SUKARAME	1 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	APBD		1 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000
KELURAHAN LOA IPUH DARAT					1.580.000.000				1.580.000.000
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	LOA IPUH DARAT	70 NILAI	130.000.000			70 NILAI	130.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	LOA IPUH DARAT	1 unit	130.000.000			1 unit	130.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	LOA IPUH DARAT	1 Paket	130.000.000	APBD		1 Paket	130.000.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	LOA IPUH DARAT	100 Presentase	1.450.000.000			100 Presentase	1.450.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	LOA IPUH DARAT	1 Kegiatan	750.000.000			1 Kegiatan	750.000.000

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	LOA IPUH DARAT	3 Unit	450.000.000	APBD		3 Unit	450.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	LOA IPUH DARAT	1 Pokmas / Ormas	300.000.000	APBD		1 Pokmas / Ormas	300.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	LOA IPUH DARAT	1 Kegiatan	700.000.000			1 Kegiatan	700.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	LOA IPUH DARAT	14 Lembaga Kemasyarakatan	700.000.000	APBD		14 Lembaga Kemasyarakatan	700.000.000
KELURAHAN MELAYU					3.230.000.000				3.230.000.000
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	MELAYU	70 NILAI	130.000.000			70 NILAI	130.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	MELAYU	1 unit	130.000.000			1 unit	130.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	MELAYU	1 Paket	90.000.000	APBD		1 Paket	90.000.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	MELAYU	1 Paket	30.000.000	APBD		1 Paket	30.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MELAYU	1 Paket	10.000.000	APBD		1 Paket	10.000.000

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	MELAYU	100 Presentase	3.100.000.000			100 Presentase	3.100.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	MELAYU	1 Kegiatan	710.000.000			1 Kegiatan	710.000.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	MELAYU	1 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	APBD		1 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	MELAYU	3 Unit	450.000.000	APBD		3 Unit	450.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	MELAYU	1 Pokmas / Ormas	230.000.000	APBD		1 Pokmas / Ormas	230.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	MELAYU	1 Kegiatan	2.390.000.000			1 Kegiatan	2.390.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	MELAYU	47 Lembaga Kemasyarakatan	2.350.000.000	APBD		47 Lembaga Kemasyarakatan	2.350.000.000
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	MELAYU	1 Unit	40.000.000	APBD		1 Unit	40.000.000
KELURAHAN BUKIT BIRU					2.080.000.000				2.080.000.000

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BUKIT BIRU	70 NILAI	130.000.000			70 NILAI	130.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	BUKIT BIRU	1 unit	120.000.000			1 unit	120.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BUKIT BIRU	1 Paket	100.000.000	APBD		1 Paket	100.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BUKIT BIRU	1 Paket	20.000.000	APBD		1 Paket	20.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	BUKIT BIRU	1 unit	10.000.000			1 unit	10.000.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BUKIT BIRU	1 Unit	10.000.000	APBD		1 Unit	10.000.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	BUKIT BIRU	100 Presentase	1.950.000.000			100 Presentase	1.950.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	BUKIT BIRU	1 Kegiatan	750.000.000			1 Kegiatan	750.000.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	BUKIT BIRU	1 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	APBD		1 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3) Pembangunan di Kelurahan	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	BUKIT BIRU	1 Unit	450.000.000	APBD		1 Unit	450.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	BUKIT BIRU	1 Pokmas / Ormas	250.000.000	APBD		1 Pokmas / Ormas	250.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	BUKIT BIRU	1 Kegiatan	1.200.000.000			1 Kegiatan	1.200.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	BUKIT BIRU	24 Lembaga Kemasyarakatan	1.200.000.000	APBD		24 Lembaga Kemasyarakatan	1.200.000.000
KELURAHAN LOA TEBU					1.930.000.000				1.930.000.000
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	LOA TEBU	70 NILAI	130.000.000			70 NILAI	130.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	LOA TEBU	1 unit	130.000.000			1 unit	130.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	LOA TEBU	1 Paket	120.860.000	APBD		1 Paket	120.860.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	LOA TEBU	1 Paket	9.140.000	APBD		1 Paket	9.140.000

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3) Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	LOA TEBU	100 Presentase	1.800.000.000			100 Presentase	1.800.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	LOA TEBU	1 Kegiatan	750.000.000			1 Kegiatan	750.000.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LOA TEBU	1 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	APBD		1 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	LOA TEBU	3 Unit	450.000.000	APBD		3 Unit	450.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	LOA TEBU	1 Pokmas / Ormas	285.000.000	APBD		1 Pokmas / Ormas	285.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	LOA TEBU	1 Kegiatan	1.050.000.000			1 Kegiatan	1.050.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	LOA TEBU	21 Lembaga Kemasyarakatan	1.050.000.000	APBD		21 Lembaga Kemasyarakatan	1.050.000.000
KELURAHAN PANJI					1.830.000.000				1.830.000.000

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PANJI	70 NILAI	130.000.000			70 NILAI	130.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	PANJI	1 unit	123.000.000			1 unit	123.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	PANJI	1 Paket	103.979.000	APBD		1 Paket	103.979.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	PANJI	1 Paket	19.021.000	APBD		1 Paket	19.021.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	PANJI	1 unit	7.000.000			1 unit	7.000.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	PANJI	1 Unit	7.000.000	APBD		1 Unit	7.000.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	PANJI	100 Presentase	1.700.000.000			100 Presentase	1.700.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	PANJI	1 Kegiatan	730.000.000			1 Kegiatan	730.000.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	PANJI	1 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	APBD		1 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PANJI	1 Unit	450.000.000	APBD		1 Unit	450.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PANJI	1 Pokmas / Ormas	240.000.000	APBD		1 Pokmas / Ormas	240.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	PANJI	1 Kegiatan	970.000.000			1 Kegiatan	970.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	PANJI	19 Lembaga Kemasyarakatan	950.000.000	APBD		19 Lembaga Kemasyarakatan	950.000.000
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	PANJI	1 Unit	20.000.000	APBD		1 Unit	20.000.000
KELURAHAN MANGKURAWANG					1.880.000.000				1.880.000.000
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	MANGKURAWANG	70 NILAI	130.000.000			70 NILAI	130.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	MANGKURAWANG	1 unit	111.500.000			1 unit	111.500.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	MANGKURAWANG	1 Paket	111.500.000	APBD		1 Paket	111.500.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	MANGKURAWANG	1 unit	18.500.000			1 unit	18.500.000

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	MANGKURAWANG	6 Unit	18.500.000	APBD		6 Unit	18.500.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	MANGKURAWANG	100 Presentase	1.750.000.000			100 Presentase	1.750.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	MANGKURAWANG	1 Kegiatan	750.000.000			1 Kegiatan	750.000.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	MANGKURAWANG	1 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	APBD		1 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	MANGKURAWANG	1 Unit	450.000.000	APBD		1 Unit	450.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	MANGKURAWANG	1 Pokmas / Ormas	260.000.000	APBD		1 Pokmas / Ormas	260.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	MANGKURAWANG	1 Kegiatan	1.000.000.000			1 Kegiatan	1.000.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	MANGKURAWANG	20 Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000.000	APBD		20 Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000.000
KELURAHAN TIMBAU					2.680.000.000				2.680.000.000

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	TIMBAU	70 NILAI	130.000.000			70 NILAI	130.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	TIMBAU	1 unit	130.000.000			1 unit	130.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	TIMBAU	1 Paket	98.000.000	APBD		1 Paket	98.000.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	TIMBAU	1 Paket	32.000.000	APBD		1 Paket	32.000.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	TIMBAU	100 Presentase	2.550.000.000			100 Presentase	2.550.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	TIMBAU	1 Kegiatan	750.000.000			1 Kegiatan	750.000.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	TIMBAU	1 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	APBD		1 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	TIMBAU	3 Unit	450.000.000	APBD		3 Unit	450.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	TIMBAU	1 Pokmas / Ormas	280.000.000	APBD		1 Pokmas / Ormas	280.000.000

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	TIMBAU	1 Kegiatan	1.800.000.000			1 Kegiatan	1.800.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	TIMBAU	36 Lembaga Kemasyarakatan	1.800.000.000	APBD		36 Lembaga Kemasyarakatan	1.800.000.000
KELURAHAN BARU					1.730.000.000				1.730.000.000
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BARU	70 NILAI	130.000.000			70 NILAI	130.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	BARU	1 unit	120.000.000			1 unit	120.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BARU	1 Paket	39.984.000	APBD		1 Paket	39.984.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BARU	1 Paket	67.569.000	APBD		1 Paket	67.569.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BARU	1 Paket	12.447.000	APBD		1 Paket	12.447.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	BARU	1 unit	10.000.000			1 unit	10.000.000

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BARU	1 Unit	10.000.000	APBD		1 Unit	10.000.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	BARU	100 Presentase	1.600.000.000			100 Presentase	1.600.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	BARU	1 Kegiatan	525.000.000			1 Kegiatan	525.000.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	BARU	1 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000	APBD		1 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	BARU	3 Unit	450.000.000	APBD		3 Unit	450.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	BARU	1 Pokmas / Ormas	50.000.000	APBD		1 Pokmas / Ormas	50.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	BARU	1 Kegiatan	1.075.000.000			1 Kegiatan	1.075.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	BARU	17 Lembaga Kemasyarakatan	850.000.000	APBD		17 Lembaga Kemasyarakatan	850.000.000

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	BARU	1 Lembaga Kemasyarakatan	225.000.000	APBD		1 Lembaga Kemasyarakatan	225.000.000
KELURAHAN MALUHU					2.080.000.000				2.080.000.000
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	MALUHU	70 NILAI	130.000.000			70 NILAI	130.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	MALUHU	1 unit	130.000.000			1 unit	130.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	MALUHU	1 Paket	100.000.000	APBD		1 Paket	100.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MALUHU	1 Paket	30.000.000	APBD		1 Paket	30.000.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	MALUHU	100 Presentase	1.950.000.000			100 Presentase	1.950.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	MALUHU	1 Kegiatan	750.000.000			1 Kegiatan	750.000.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	MALUHU	1 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	APBD		1 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	MALUHU	3 Unit	450.000.000	APBD		3 Unit	450.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	MALUHU	1 Pokmas / Ormas	285.000.000	APBD		1 Pokmas / Ormas	285.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	MALUHU	1 Lembaga	1.200.000.000			1 Lembaga	1.200.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	MALUHU	24 Lembaga Kemasyarakatan	1.200.000.000	APBD		24 Lembaga Kemasyarakatan	1.200.000.000
KELURAHAN LOA IPUH					4.730.000.000				4.730.000.000
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	LOA IPUH	70 NILAI	130.000.000			70 NILAI	130.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	LOA IPUH	1 unit	120.000.000			1 unit	120.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	LOA IPUH	1 Paket	110.000.000	APBD		1 Paket	110.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LOA IPUH	1 Paket	10.000.000	APBD		1 Paket	10.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	LOA IPUH	1 unit	10.000.000			1 unit	10.000.000

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	LOA IPUH	1 Unit	10.000.000	APBD		1 Unit	10.000.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	LOA IPUH	100 Presentase	4.600.000.000			100 Presentase	4.600.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	LOA IPUH	1 Kegiatan	750.000.000			1 Kegiatan	750.000.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LOA IPUH	1 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	APBD		1 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	LOA IPUH	3 Unit	450.000.000	APBD		3 Unit	450.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	LOA IPUH	1 Pokmas / Ormas	285.000.000	APBD		1 Pokmas / Ormas	285.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	LOA IPUH	1 Kegiatan	3.850.000.000			1 Kegiatan	3.850.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	LOA IPUH	77 Lembaga Kemasyarakatan	3.850.000.000	APBD		77 Lembaga Kemasyarakatan	3.850.000.000

Kode	Program/Kegiiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Indikator	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jumlah					107.920.481.032				107.920.481.032

BAB V
PENUTUP

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana strategis Kecamatan Tenggarong Tahun 2022-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun.

Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tenggarong.

Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 Kecamatan Tenggarong merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2025. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Tenggarong.

5.1 Hal – Hal Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

5.2 Kaidah – kaidah pelaksanaan

Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan sebagai penyesuaian dengan kebutuhan yang ada serta mendesak untuk dilaksanakan di tahun 2025 agar pelaksanaan Program Kegiatan SKPD Kecamatan Tenggarong di Tahun 2025 ini bisa sesuai dengan apa yang telah

direncanakan, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Kecamatan Tenggarong berkewajiban untuk mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tenggarong Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kab. Kutai Kartanega.
b. Kecamatan Tenggarong berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Tenggarong Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Tenggarong Tahun 2025 dan RKPD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025.
c. Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tenggarong selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Tenggarong. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Tenggarong Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai, sarana dan prasarana serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Kecamatan Tenggarong ini juga masih terdapat kekurang-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Kecamatan Tenggarong Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

oo.RENJA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada RKPD, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang dalam Grand Strategy pembangunan yang dikenal dengan nama KUKAR IDAMAN (Inovatif, Daya Saing dan Mandiri) yang dicanangkan sejak terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9 Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10 Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

14 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

15 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

16 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

I.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Kecamatan Tenggarong Seberang mengacu pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari :

a. Camat;
b. Sekretaris Camat, terdiri dari :
    1) Sub Bagian Umum, Tatalaksana dan Kepegawaian
    2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
c. Seksi Pemerintahan
d. Seksi Trantib dan Linmas
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)
f. Seksi Kesejahteraan Sosial
g. Seksi Pelayanan Umum

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Tenggarong Seberang adalah sebagai berikut

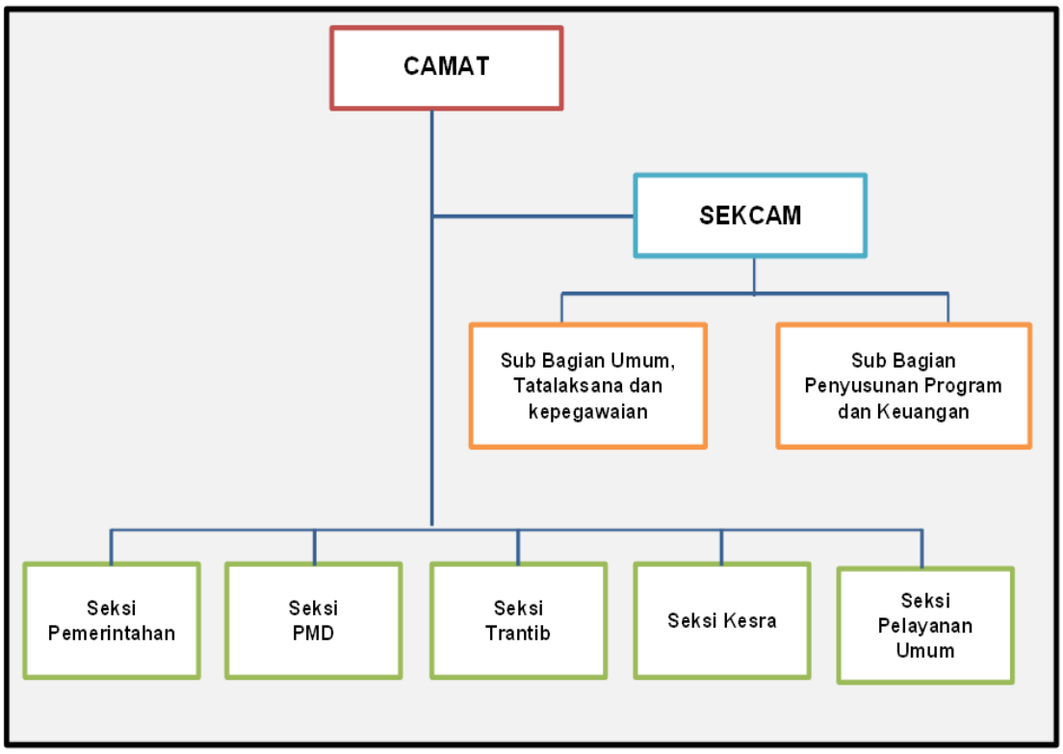

I.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja SKPD Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

2. Tujuan

   Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2025.

I.5 SISTEMATIKA PENULISAN

I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistem Matika Penulisan

II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
III.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
IV.1 Program dan Kegiatan
V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (RENJA) suatu SKPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan- kegiatan atau program yang telah di susun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal; yaitu pencapaian (i) kinerja output dan (ii) kinerja keuangannya. Yang dimaksud dengan kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

A. Analisis Kinerja Output

Berdasarkan data-data yang ada kinerja keluaran (output performance) hampir 100% menunjukkan kinerja keluaran yang sempurna, yaitu capaian kinerjanya 100% jika dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam DPA kegiatan. Artinya, hampir seluruh PPTK mampu merealisasikan indikator kinerja dengan sempurna (jumlah buku, laporan, peta, pelaksanaan kursus/pelatihan, dll)

B Analisis Kinerja Keuangan

Analisa Kinerja keuangan dilakukan untuk melihat efesiensi realisasi penyerapan dana berdasarkan sasaran yang telah

ditetapkan.Hal ini dapat dilihat melalui kinerja keuangan per program

C Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel TC. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota Kutai Kartanegara

KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Kinerja (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja-PD Tahun (2023)	Realisasi Renja-PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100	95	95	95	100%	98	98	98%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45	9	9	9	100%	9	27	60%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	10	2	2	2	100%	2	6	60%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%

7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	2	2	2	100%	2	6	60%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	100	85	85	85	100%	86	86	86%
		Tersedianya gaji dan tunjangan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
		Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan	60	12	12	12	100%	12	36	60%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20	4	4	4	100%	4	12	60%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	15	3	3	3	100%	3	9	60%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	20	4	4	4	100%	4	12	60%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10	2	2	2	100%	2	6	60%

7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	100	85	85	85	100%	85	85	85%
		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	100	85	85	85	100%	95	95	95%
		Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	80	60	60	60	100%	65	65	81%
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	370	74	74	74	100%	74	222	60%
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	370	74	74	74	100%	74	222	60%
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20	4	4	4	100%	4	12	60%
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	3	3	3	100%	3	9	60%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	98	98	98	98	100%	98	98	100%

7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50	10	10	10	100%	10	30	60%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	300	60	60	60	100%	60	180	60%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	215	43	43	43	100%	43	129	60%
		Jumlah Makanan dan Minuman	4.800	960	960	960	100%	960	2.880	60%
7.01.01.2.06.0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	876.940	175388	175388	175388	100%	175.388	526.164	60%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	1.800	360	360	360	100%	360	1.080	60%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitas	60	12	12	12	100%	12	36	60%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	475	95	95	95	100%	95	285	60%
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tata Kelola Arsip	400	80	80	80	100%	80	240	60%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang diadakan	2.315	463	463	463	100%	463	1.389	60%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	12	12	12	100%	12	36	60%

7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	12	12	12	100%	12	36	60%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	60	12	12	12	100%	12	36	60%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	50	10	10	10	100%	10	30	60%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	50	10	10	10	100%	10	30	60%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	125	25	25	25	100%	25	75	60%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	67	67	67	67	100%	67	67	100%
		Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan								
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	100	100	100	100	100%	100	100	100%

	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	5	1	1	1	100%	1	3	60%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	100	100	100	100		100	100	100%
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	500	100	100	100	100%	100	300	60%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait	45	9	9	9	100%	9	27	60%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01..03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01..03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	90	18	18	18	100%	18	54	60%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	-	-	-	0%	100	85	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	-	-	-	0%	100	85	100%
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas	Presentasi kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatakan kepoliasian Negara RI, TNI dan instansi vertikal serta	255	-	-	-	-	85	85	33%

	Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	tokoh agama dan tokoh masyarakat diwilayah Kecamatan								
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang melibatkan PD dan instansi vertikal terkait yang dilaksanakan secara efektif	60	-	-	-	-	20	20	33%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	100	90	90	90	100%	90	90	90%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	90	18	18	18	100%	18	54	60%
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	500	100	100	100	100%	100	300	60%
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	45	9	9	9	100%	9	27	60%
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum kantor camat	135	27	27	27	100%	27	81	60%
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kegiatan Pendampingan Kecamatan	90	18	18	18	100%	18	54	60%

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tenggarong Seberang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya Disiplin aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Tenggarong Seberang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal:

   Kekuatan :

   - Visi dan misi organisasi yang jelas
   - Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
   - Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
   - Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan
   - Adanya sarana dan prasarana

   Kelemahan :

   - Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
   - Belum maksimalnya koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
   - Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi
   - Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. Lingkungan Eksternal

   Peluang

   - RPJM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026
   - Agenda pembangunan tahunan kabupaten Kutai Kartanegara

- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Ancaman :

- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
- Masih Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masayarakat
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masayarakat yang mengalami penurunan kualitas.

TABEL TC-30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah KecamatanTenggarong seberang

Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			95	95	98	100	100	98	98	98	98	
2	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9	9	9	9	9	9	36	36	36	
3	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			85	85	86	100	100	86	86	86	86	
4	Tersedianya gaji dan tunjangan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			95	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			100	100	100	100	100	85	85	85	85	
7	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			75	85	85	95	100	95	95	95	95	
8	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan			75	85	95	95	100	65	65	65	65	
9	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan			55	60	65	70	75	98	98	98	98	
10	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			98	98	98	98	98	100	100	100	100	
11	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
13	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara			100	100	100	100	100	67	67	67	67	

14	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP			65	67	67	67	67	67	67	67	67	
15	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
16	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat			95	100	100	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
18	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
19	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan			85	85	85	85	85	100	85	85	85	
20	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				85	85	85	85	100	85	85	85	
21	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik			90	90	90	90	100	90	90	90	90	
22	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
23	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100	100	100	100	100	100	100	100	100	

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Kecamatan Tenggarong Seberang.

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Kecamatan Tenggarong Seberang sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi.

Kecamatan Tenggarong Seberang masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan kedepan sebagai Pusat Kegiatan wilayah (PKW), terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Prasarana dan sarana yang tersedia masih kurang lengkap dan belum memadai
2. Sistem kerja yang belum optimal
3. Sumber daya manusia yang belum optimal
4. Kapasitas kelembagaan desa belum optimal
5. Infrastruktur pedesaan masih kurang pada Renja Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2025 dan yang akan datang tahun 2026

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tenggarong Seberang, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus dipacu dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang

tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu SKPD Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.
4. Mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi melalui multi stakeholder yang ada di Kecamatan Tenggarong Seberang.

b. Isu Strategis Eksternal.

Kinerja dan Sinergitas antara instansi OPD, Dinas dan Pemerintah Daerah serta instansi/institusi lainnya, yaitu :

1. Penguatan Peran Kecamatan.
2. Otonomi Desa yang bersinergi.
3. Masyarakat yang aktif dan religius

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai Lampiran.

TABEL TC. 31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tenggarong Seberang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	9,446,764,254	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tenggarong Seberang	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	12,107,921,562	
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	340,000,000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	340,000,000	

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50,000,000	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25,000,000	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	25,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	25,000,000	-
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25,000,000	-
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	25,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	25,000,000	-

			Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			DPA-SKPD					
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	180,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	180,000,000	-
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10,000,000	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	6 Kegiatan	7,096,607,994	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	6 Kegiatan	8,449,621,562	
			Tersedianya gaji dan tunjangan	100 persen				Tersedianya gaji dan tunjangan	100 persen		
			Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100 persen				Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100 persen		

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	55 Orang/ Bulan	6,956,607,994	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	55 Orang/Bulan	8,309,621,562	Hasil Rekonsiliasi dengan BPKAD
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	10,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan	10,000,000	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10,000,000	
4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5,000,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5,000,000	

5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	100,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	100,000,000	
6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	15,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	15,000,000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	3	Dokumen	48,800,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	3	Dokumen	70,800,000	

1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Perlu adanya privat pembelajaran secara khusus agar data BMD up to date
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	40,800,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	40,800,000	
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15,000,000	Perlu adanya privat pembelajaran secara khusus agar data BMD

											up to date
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	6 Kegiatan	161,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	6 Kegiatan	505,000,000	
			Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	95 Paket				Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	95 Paket		
			Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	75 Persen				Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	75 Persen		
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	66 Paket	114,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	66 Paket	200,000,000	Pembaharuan Pakaian DInas penting dilakukan agar tidak terjadi kesenjanga

											n antar ASN
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	66	Dokumen	4,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	66	Dokumen	10,000,000	perlu penambahan anggaran untuk suport pembaharuan data kepegawaian yang up to date
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	4,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	10,000,000	perlu penambahan anggaran untuk suport pembaharuan data kepeg

											awaian yang up to date
4	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	4,000,000	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	15,000,000	perlu penambahan anggaran untuk suport pembaharuan data kepegawaian yang up to date
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tenggarong Seberang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	20,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tenggarong Seberang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	150,000,000	perlu melakukan update SDM agar kompetensi yg dimiliki ASN

											lebih ahli sesuai bidang
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	15,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	120,000,000	perlu melakukan update SDM agar kompetensi yg dimiliki ASN lebih ahli sesuai bidang
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 Kegiatan	745,256,260	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 Kegiatan	970,000,000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29,413,760	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Peneran	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Unit	45,000,000	Tingginya rutinitas menjadikan komponen

						gan Bangunan Kantor					listrik perlu dipemeliharaan yang sesuai dengan kebutuhan
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	85,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100,000,000	Perlu penambahan peralatan dan perlengkapan kantor
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	100,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	100,000,000	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	70,155,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	85,000,000	Penambahan anggaran biaya foto copy dan penggandaan

											perlu dilakukan untuk menunjang kebutuhan data secara fisik
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	312 Dokumen	3,600,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen	5,000,000	Beragam bahan bacaan diperlukan untuk menambah an wawasan dan informasi
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	50,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	85,000,000	tingginya kunjungan tamu dan rapat sehingga perlu penambahan

											anggaran rapat yang melibatkan orang diluar kantor
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	307,087,500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan	350,000,000	banyaknya undangan dan pelatihan sehingga perlu dilakukan penambahan khususnya di perjalanan dinas luar daerah
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	50,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	80 Dokumen	100,000,000	up to date pembaharuan peralatan

											dan perlengkapan kearsipan
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	50,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	100,000,000	Penambahan peralatan penunjang Sistem layanan kepada masyarakat
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tenggarong Seberang	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Unit	180,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tenggarong Seberang	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Unit	350,000,000	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong Seberang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	180,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong Seberang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	350,000,000	170,000,000	Perlu adanya peremajaan kendaraan dinas

												roda 4 guna menunjang kinerja pejabat Ess III
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong Seberang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Dokumen	440,100,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong Seberang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Dokumen	742,500,000		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,100,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7,500,000	2,400,000	Penambahan Biaya Materai untuk kebutuhan admnistrasi perkantoran
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	65,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	300,000,000	235,000,000	Penambahan daya listrik dan biaya bulanan Air, Listri

												k dan Internet
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	20,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	35,000,000	15,000,000	Perlu penambahan anggaran untuk pemeliharaan peralatan kantor berupa Komputer, Laptop, Printr dan AC serta penunjang kerja lainnya
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	350,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	400,000,000	50,000,000	Penambahan anggaran BPJS THL dan pena

												mbahan tenaga keamanan baru dikantor Camat Baru
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	38 Unit	435,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	63 Unit	680,000,000		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong Seberang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong Seberang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	50,000,000	40,000,000	Biaya tambahan Perbaikan rusak pada kendaraan roda 4 dan biaya perpanjangan pajak serta KIR Pick UP

2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong Seberang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	125,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong Seberang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	Unit	200,000,000	75,000,000	Biaya tambahan BBM dan Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15	Unit	25,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1	Unit	50,000,000	25,000,000	Peralatan lama atau tua sangat diperlukan perbaikan dan pemeliharaan lebih tinggi
4	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	1	Unit	25,000,000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	35	Unit	30,000,000	5,000,000	pemeliharaan perlengkapan kantor dan ruma

												h dinas sangat diperlukan untuk menunjang kinerja pejabat Struktural
5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150,000,000	-	
6	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	100,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	200,000,000	100,000,000	pemeliharaan kantor dan rumah dinas sangat diperlukan untuk menunjang kinerja pejabat

												Struktural
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tenggarong Seberang			27,720,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tenggarong Seberang			39,135,000,000		
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tenggarong Seberang		132 Dokumen	27,690,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tenggarong Seberang		187 Dokumen	38,875,000,000		
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	130 Laporan	27,660,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	130 Laporan	35,455,000,000	-	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tenggarong Seberang	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	- -	-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tenggarong Seberang	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 Kegiatan	3,000,000,000	3,000,000,000	- Peningkatan LPJU tiang listrik, listrik, lampu sebag

												ai upaya peningkatan layanan masyarakat untuk mendukung aktivitas perekonomian di malam hari
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Tenggarong Seberang	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 Laporan	30,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Tenggarong Seberang	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	32 orang	300,000,000	270,000,000	- Bimtek OL peningkatan Layanan Publik dalam rangka upaya peningkatan kualitas

												layanan
4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Tenggarong Seberang	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	- -	-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Tenggarong Seberang	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2 kegiatan	120,000,000	120,000,000	- Sosialisasi peningkatan Penanganan Sampah 18 Desa sebagai upaya meningkatkan kontribusi masyarakat
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Tenggarong Seberang			30,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Tenggarong Seberang			260,000,000		
1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di	Tenggarong Seberang	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan	1 Laporan	30,000,000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di	Tenggarong Seberang	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja	2 Laporan	60,000,000	60,000,000	Survey kepuasan masyarakat

	Wilayah Kecamatan		oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			Wilayah Kecamatan		Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				SKM/ IKM , melaksanakan kewajiban memberikan laporan indek kualitas layanan kepada masyarakat
2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Tenggarong Seberang	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	-	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Tenggarong Seberang	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2	kegiatan	200,000,000	200,000,000	- Fasilitasi bintek dan layanan penerbitan perijinan pelaku UMKM 18 Desa , sebagai upaya

												percepatan perkembangan pelaku usaha mikro
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tenggarong Seberang	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	330,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	1,635,892,700		
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tenggarong Seberang			330,000,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tenggarong Seberang			1,635,892,700		
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tenggarong Seberang	Terkelolanya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	30,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tenggarong Seberang	Terkelolanya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18 Desa	80,000,000	50,000,000	
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Tenggarong Seberang	Terkelolanya Partisipasi Masyarakat dalam	- -	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tenggarong Seberang	Terkelolanya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawar	18 Desa	270,000,000	270,000,000	- Lomba Teknologi Tepat Guna antar Desa / Posyantek

	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					ah Perencanaan Pembangunan di Desa				
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tenggarong Seberang	Terkelolanya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tenggarong Seberang	Terkelolanya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18	Desa	200,000,000	200,000,000	- Lomba Kebersihan Antar Desa
4	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tenggarong Seberang	Terkelolanya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tenggarong Seberang	Terkelolanya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4	Kegiatan	200,000,000	200,000,000	- Peningkatan Kapasitas Pengelola dan petugas sampah sampah
5	Peningkatan Efektifita	Tenggarong	Jumlah laporan peningk	-	-	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Tenggarong	Jumlah laporan peningkat	1	Laporan	159,705,000	159,705,000	- Hut RI Kecamatan

	s Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sebera ng	atan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan			Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Seber ang	an efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan				
6	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tenggarong Sebera ng	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	-	-	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tengg arong Seber ang	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	1	Lapo ran	31,715,000	31,715,000	- Kegiatan Erau
7	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tenggarong Sebera ng	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	2	Laporan	150,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tengg arong Seber ang	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	1	Lapo ran	274,862,700	124,862,700	- Fasilitasi MTQ

8	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tenggarong Seberang	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	-	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tenggarong Seberang	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	1	Laporan	25,000,000	25,000,000	- Kegiatan Pramuka
9	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tenggarong Seberang	jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	-	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tenggarong Seberang	jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	1	Laporan	19,610,000	19,610,000	- Kegiatan TIFAF
10	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tenggarong Seberang	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah	2	Laporan	150,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tenggarong Seberang	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	1	Laporan	150,000,000	-	- PKK

			Kecamatan									
11	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tenggarong Seberang	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	-	-	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tenggarong Seberang	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	1	Laporan	150,000,000	150,000,000	- HKG PKK
12	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tenggarong Seberang	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	-	-	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tenggarong Seberang	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	1	Kegiatan	75,000,000	75,000,000	- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pokjanal Kecamatan
13	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Tenggarong Seberang	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyara	-	-	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tenggarong Seberang	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di	1	Kegiatan	50,000,000	50,000,000	- Pendataan Sekolah

	Kecamatan		kat di wilayah Kecamatan					wilayah Kecamatan				
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tenggarong Seberang	-	-	-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		-	-	-		
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tenggarong Seberang	-	-	-	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tenggarong Seberang	-	-	-		
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tenggarong Seberang	-	-	-	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tenggarong Seberang	-	-	-		
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Tenggarong Seberang	-	-	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tenggarong Seberang	-	-	-		

	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tenggarong Seberang			200,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tenggarong Seberang			1,973,266,600		
1	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keaman	-	-	-	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	1 laporan	115,000,000	115,000,000	- Perlengkapan Satpol Linmas dan Pertukangan

			an Lokal Regional dan Nasional									
2	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	- -	-	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	1 laporan	150,000,000	150,000,000	- Sosialisasi Penanggulangan Masalah Sosial Masyarakat "Perselisihan Agama, Suku dan Ras"

3	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	-	-	-	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	1	laporan	100,000,000	100,000,000	- Sosialisasi Penanggulangan Masalah Kenakalan Remaja, Narkoba dan Penyimpangan Seks Bebas
4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan	-	-	-	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku	1	laporan	199,994,700	199,994,700	- Sosialisasi/Himbauan Trantibum "Gepeng, Anjal, ODGJ, Pengemis dan PSK"

	dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional		Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional			Regional dan Nasional		Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional				
5	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewuju	-	-	-	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal	1 laporan	443,277,200	443,277,200	- Pelatihan/Bimtek/Pembekalan Anggota Linmas Desa Se Kecamatan Tenggarong Seberang

	Regional dan Nasional		dkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional					Regional dan Nasional				
6	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	-	-	-	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	1 laporan	199,994,700	199,994,700	- Sosialisasi/Himbauan Trantibum "IMB, Bangunan Fasum, Warung Semi Modern, PKL"

7	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	-	-	-	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	1	laporan	150,000,000	150,000,000	- Sosialisasi Penegakan Hukum Di Kecamatan Tenggarong Seberang
8	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan	-	-	-	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku	1	laporan	150,000,000	150,000,000	- Pembinaan Masalah Sosial Di Sekolah Sekolah Lingkup Kecamatan Tenggarong Seberang

	dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional		Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional			Regional dan Nasional		Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional				
9	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewuju	-	-	-	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal	1 laporan	70,000,000	70,000,000	- Monitoring pengawasan Wilayah di Tenggarong Seberang

	Regional dan Nasional		dkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional					Regional dan Nasional				
10	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	36 Orang	195,000,000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	36 Orang	195,000,000	-	

11	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	5,000,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 laporan	200,000,000	195,000,000	- Rakor Forkompimcam "Peran serta Tenggarong Seberang Dalam Menghadapi Generasi G5"
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tenggarong Seberang	Jumlah Desa Yang difasilitasi			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tenggarong Seberang	Jumlah Desa Yang difasilitasi				
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tenggarong Seberang	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan		256,844,122	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tenggarong Seberang	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan		856,000,000		
1	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	5 Dokumen	15,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	14 Desa	80,000,000	65,000,000	

			aan Pemilihan Kepala Desa					Pemilihan Kepala Desa				
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Dokumen	15,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	18 Desa	60,000,000	45,000,000	
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	- -	-	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	18 Desa	30,000,000	30,000,000	- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa
4	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman	12 Dokumen	186,000,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan	12 Dokumen	186,000,000	-	

			dan Ketertiban Umum					Ketertiban Umum				
5	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	18 Desa	-	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	18 Desa	60,000,000	60,000,000	- Bimtek Lembaga Adat Daerah (LAD)
6	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	18 Desa	15,844,122	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	18 Desa	40,000,000	24,155,878	- Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan
7	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	25,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Desa	400,000,000	375,000,000	- Pelatihan Keuangan Desa
					37,953,608,376					55,958,080,862		

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Tenggarong Seberang pada tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Tenggarong Seberang maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

TABEL TC.32

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

No	Kamus Usulan	Permasalahan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Kantor Desa Separi yang lama selain sempit juga kondisi bangunannya sudah lapuk, terdapat dibeberapa sisi bangunan dindingnya sudah banyak yang berlubang dikarenakan kualitas kayunya yang rendah dan atapnya bocor di beberapa bagian bangunan sehingga kalau hujan deras air hujan merembes masuk ke dalam keruangan kerja, dengan kondisi seperti itu dirasa sangat tidak layak dan memadai untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat.	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Separi		-	data belum lengkap. silahkan melengkapi data Legalitas kepemilikan aset tanah Pemda.
2	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Lanjutan Semenisasi Jalan Trans L IV - Separi Kampung, Keberadaan jalan ini sangat penting karena merupakan akses utama warga Desa Separi atau desa tetangga disekitar wilayah Desa Separi ketika akan pergi ke ibukota kecamatan	-	Separi		-	Tidak sesuai kamus usulan, sesuaikan permasalahan sesuaikan dengan kamus usulan : Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)

		atau ke kabupaten maupun ke Samarinda. untuk itu lanjutan semenisasi jalan ini sangat diharapkan oleh warga untuk segera terealisasi guna memudahkan mobilitas ketika akan pergi keluar Desa Separi atau sebaliknya.					
3	Pengembangan Ekonomi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Pembangunan Pasar Desa Separi dirasa sangat perlu untuk menampung kegiatan usaha/UMKM dalam menjalankan usahanya sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga hingga masyarakat Desa Separi	-	Separi		-	-
4	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Pengurugan Lahan Lokasi Kantor Desa, sangat perlu dilakukan sebelum dibangunnya proses pembangunan Kantor Desa yang representatif mengingat lahan lokasi yang akan dibangun kantor desa tersebut merupakan lahan yang berupa rawa-rawa yang mana selalu terdapat genangan air di atasnya, untuk itu sangat diharapkan kegiatan pengurugan tersebut dapat terlaksna	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Separi		-	data belum lengkap. silahkan melengkapi data Legalitas kepemilikan aset tanah / Pernyataan Lahan tidak sengketa. Diharapkan peket pekerjaan dijadikan 1 (digabung) (Pekerjaan Pengurugan Kantor Desa, PKK, BUMDES, LPM)

		sehingga proses pembangunan kantor desa bisa terlaksana dengan baik sesuai target yang ditetapkan.					
5	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Pengurugan Lahan Lokasi Gedung PKK, sangat perlu dilakukan sebelum dibangunnya proses pembangunan Gedung PKK yang representatif mengingat lahan lokasi yang akan dibangun Gedung PKK tersebut merupakan lahan yang berupa rawa-rawa yang mana selalu terdapat genangan air di atasnya, untuk itu sangat diharapkan kegiatan pengurugan tersebut dapat terlaksna sehingga proses pembangunan Gedung PKK bisa terlaksana dengan baik sesuai target yang ditetapkan.	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Separi		-	data belum lengkap. silahkan melengkapi data Legalitas kepemilikan aset tanah / Pernyataan Lahan tidak sengketa. Diharapkan peket pekerjaan dijadikan 1 (digabung) (Pekerjaan Pengurugan Kantor Desa, PKK, BUMDES, LPM)

6	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Pengurugan Lahan Lokasi Gedung BUMDes, sangat perlu dilakukan sebelum dibangunnya proses pembangunan gedung BUMDes yang representatif mengingat lahan lokasi yang akan dibangun kantor desa tersebut merupakan lahan yang berupa rawa-rawa yang mana selalu terdapat genangan air di atasnya, untuk itu sangat diharapkan kegiatan pengurugan tersebut dapat terlaksna sehingga proses pembangunan gedung BUMDes bisa terlaksana dengan baik sesuai target yang ditetapkan.	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Separi		-	data belum lengkap. silahkan melengkapi data Legalitas kepemilikan aset tanah / Pernyataan Lahan tidak sengketa. Diharapkan peket pekerjaan dijadikan 1 (digabung) (Pekerjaan Pengurugan Kantor Desa, PKK, BUMDES, LPM) 1333323 13-02-2024 Sugianto, SH Pengurugan Lahan Lokasi Kantor LPM, sangat perlu dilakukan sebelum dibangunnya proses pembangunan Kantor LPM yang representatif mengingat lahan lokasi yang akan dibangun kantor LPM tersebut merupakan lahan yang berupa rawa-rawa yang mana selalu terdapat genangan air di atasnya, untuk itu sangat diharapkan kegiatan pengurugan tersebut dapat terlaksna sehingga proses pembangunan kantor LPM bisa terlaksana dengan baik sesuai target yang ditetapkan. Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan) Desa Separi, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Separi Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum data belum lengkap. silahkan melengkapi data Legalitas kepemilikan aset tanah / Pernyataan Lahan tidak sengketa. Diharapkan peket pekerjaan dijadikan 1 (digabung)

							(Pekerjaan Pengurugan Kantor Desa, PKK, BUMDES, LPM)
7	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Pengurugan Lahan Lokasi Kantor LPM, sangat perlu dilakukan sebelum dibangunnya proses pembangunan Kantor LPM yang representatif mengingat lahan lokasi yang akan dibangun kantor LPM tersebut merupakan lahan yang berupa rawa-rawa yang mana selalu terdapat genangan air di atasnya, untuk itu sangat diharapkan kegiatan pengurugan tersebut dapat terlaksna sehingga	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Separi		-	data belum lengkap. silahkan melengkapi data Legalitas kepemilikan aset tanah / Pernyataan Lahan tidak sengketa. Diharapkan peket pekerjaan dijadikan 1 (digabung) (Pekerjaan Pengurugan Kantor Desa, PKK, BUMDES, LPM)

		proses pembangunan kantor LPM bisa terlaksana dengan baik sesuai target yang ditetapkan.					
8	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Pengurugan Lahan Ruang Klinik Desa, sangat perlu dilakukan sebelum dibangunnya proses pembangunan Ruang Klinik Desa yang representatif mengingat lahan lokasi yang akan dibangun Ruang Klinik Desa tersebut merupakan lahan yang berupa rawa-rawa yang mana selalu terdapat genangan air di atasnya, untuk itu sangat diharapkan kegiatan pengurugan tersebut dapat terlaksna sehingga proses pembangunan Ruang Klinik Desa bisa terlaksana dengan baik sesuai target yang ditetapkan.	-	Separi		-	Surat permohonan sudah kadaluwarsa, dan untuk kepentingan Klinik Desa disarankan untuk ditujukan ke Kecamatan
9	Rehabilitasi Jalan Menuju Akses Pendidikan,Kesehatan, Wisata dan Jalan Produksi Kabupaten	belum terselesaikannya semenisasi jalan goa sehingga akses jalan wisata belum bisa maksimal	-	Suka Maju		-	usulan tidak dilengkapi dokumen pendukung

10	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	perlu penigkatan jalan lingkungan Perumahan	-	Suka Maju		-	Lengkapi data pendukung : proposal/surat permohonan/volume/dimensi (PxLxT) pekerjaan, titik koordinat dan dokumentasi (foto lokasi).
11	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong	perlu penurapan Parit Induk Desa	-	Suka Maju		-	Dokumen pendukung Seperti Foto, Proposal, Titik Koordinat dan volume belum lengkap/belum ada
12	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Rehab Total Masjid Jami Nurussalam, sudah sepatutnya dilakukan rehab total karena setelah dibangun lebih dari 30 tahun yang lalu belum pernah dilakukan perbaikan atau renovasi karena kondisi bangunan seperi tiang bangunan disisi selatan suda tidak kokoh karena berada di tepi sungai mahakam, bagian didinding dan plafon kayunya sudah lapuk karena menggunakan kayu kualitas rendah serta atap yang bocor di beberapa bagian masjid.	-	Separi		-	-

13	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Pembuatan Teras Masjid Jami Al Mujahidin, sudah lama direncanakan namun terkendala dengan kondisi keuangan/kas masjid yang tidak mencukupi utntuk itu besar harapan pengurus masjid untuk melanjutkan pembuatan teras masjid ini mendapat kucuran dana atau bantuan dari APBD Kabupaten karenakeberadaan teras ini di rasa cukup penting selain dari segi estetika dan keindahan masjid itu sendiri juga untuk menampung jamaah pada sholat hari raya atau hari besar islam	-	Separi		-	-
14	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Normalisasi Parit RT.09, sangat perlu dilakukan normalisasi karena kondisi tanah RT.9 bagian belakang masih berupa rawa di beberapa titik sehingga terdapat genangan air yang mana kondisi parit yang ada sekarang ini tidak berfungsi dengan baik karena terjadi pendangkalan sehingga posisi parit hampir sama dengan lahan .	-	Separi		-	-

15	Penurapan Jalan (Beton/Pasangan Batu)	Pembuatan Turap Beton Jalan RT.008 sangat mendesak untuk dilakukam karena di beberapa badan jalan sudah banyak yang rusak karena terjadi abrasi di sepanjang aliran sungai mahakam terutama di RT.008 yang terdampak paling parah sehingga terjadi retakan dan penurunan badan jalan sehingga tidak aman untuk dilintasi oleh kendaraan.	-	Separi		-	-
16	Penurapan Jalan (Beton/Pasangan Batu)	Pembuatan Turap Beton Jalan RT.009 sangat mendesak untuk dilakukam karena di beberapa badan jalan sudah banyak yang rusak karena terjadi abrasi di sepanjang aliran sungai mahakam terutama di RT.009 yang terdampak paling parah sehingga terjadi retakan dan penurunan badan jalan sehingga tidak aman untuk dilintasi oleh kendaraan	-	Separi		-	-
17	Penurapan Jalan (Beton/Pasangan Batu)	Pembuatan Turap Beton Jalan RT.010 sangat mendesak untuk dilakukam karena di beberapa badan jalan sudah banyak yang rusak	-	Separi		-	-

		karena terjadi abrasi di sepanjang aliran sungai mahakam terutama di RT.010 yang terdampak paling parah sehingga terjadi retakan dan penurunan badan jalan sehingga tidak aman untuk dilintasi oleh kendaraan					
18	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	1. Kondisi Jalan saat ini rusak berat serta berlubang sehingga membahayakan bagi pengendara. 2. Jalan sangat berdebu di musim kemarau dan becek di musim hujan. 3. Terjadi pengikisan tanah yang berkepanjangan. 4. Jalan Poros ini merupakan jalan penghubung untuk sebagian desa di Tenggarong Seberang menuju ke Kecamatan	-	Loa Raya		-	-
19	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Pembangunan Gedung PKK Desa Bukit Raya RT 019 Desa Bukit Raya (Dikarenakan Gedung PKK Sudah Tidak Layak)	-	Bukit Raya		-	-
20	Penyediaan Unit Keramba	Karena Desa Teluk Dalam Bertempat di sekitar pesisir sungai mahakam demi meningkat ekonomi masyarakat dan mengurangi	-	Teluk Dalam		-	Lengkapi peta lokasi

		penganguran adapun dengan ini kami memohon bantuan keramba dengan dana tersedia di pemerintah					
21	Pemeliharaan Bangunan Chek Dam dan Saluran Check Dam Dengan Lebar Saluran Lebih Dari 4 Meter	Pemeliharaan Check Dam Ngudi Rahayu RT 019 (Untuk Menjaga Berfungsinya Instalasi Pengendali Atau Penahan Air)	-	Bukit Raya		-	-
22	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Peningkatan Jalan Usaha Tani RT 006 Desa Bukit Raya (Kondisi Jalan Yang Kurang Baik dan Susah Dilalui Saat Musim Penghujan)	-	Bukit Raya		-	-
23	Rehabilitasi Jalan Menuju Akses Pendidikan,Kesehatan, Wisata dan Jalan Produksi Kabupaten	Terdapat 60 ha lahan tidur yang tidak dapat digarap masyarakat karena jalan yang ada rusak parah dan tidak dapat dilewati juga terputus akibat dampak dari penambangan eks.PT.FBS yang sudah tidak beroperasi lagi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Loa Pari		2,8	-
24	Pemeliharaan Bangunan Chek Dam dan Saluran Check Dam Dengan Lebar Saluran Lebih Dari 4 Meter	Pemeliharaan Cekdam Kelompok Tani Dewi Shinta (Untuk Memelihara Berfungsinya Instalasi Pengendali atau Penahan Air)	-	Bukit Raya		-	-
25	Pemeliharaan Bangunan Chek Dam dan Saluran Check Dam Dengan Lebar Saluran Lebih Dari 4 Meter	Pemeliharaan Cekdam Kelompok Tani Sidomulyo RT 013 Desa Bukit Raya (Untuk Menjaga Berfungsinya Instalasi Pengendali	-	Bukit Raya		-	-

		atau Penahan Air)					
26	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Lanjutan Semenisasi Jalan Gunung Lai sangat penting untuk direalisasikan sebagai cara untuk perluasan wilayah pemukiman mengingat semakin bertambahnya jumlah penduduk serta padatnya pemukiman di pesisir sungai mahakam maka semenisasi jalan Gunung Lai ini perlu dilakukan sebagai persiapan pembangunan pemukiman di wilayah desa separi, dan kedepannya jalan gunung lai ini akan di koneksikan dengan jalan Tambak Tiga di belakang Kantor Desa yang baru yang juga akan dibangun Lapangan bola dll.	-	Separi		-	-
27	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Pembuatan Parit Drainase RT 008 Desa Bukit Raya (Sering Terjadinya Banjir Saat Hujan Sampai Masuk Rumah Warga)	-	Bukit Raya		-	-

28	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Peningkatan Jalan Usaha Tani RT 009 Desa Bukit Raya (Kondisi Jalan Yang Rusak dan Susah Dilalui Saat Musim Penghujan)	-	Bukit Raya		-	-
29	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Lanjutan Penimbunan Jalan Usaha Tani Gang Sakur RT 018 Desa Bukit Raya (Kondisi Jalan Yang Rusak dan Susah Dilalui Saat Musim Penghujan)	-	Bukit Raya		-	-
30	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Lanjutan Semenisasi Jalan Trunojoyo RT 002 Desa Bukit Raya (Kondisi Jalan Yang Rusak Sehingga Menghambat Aktivitas Warga)	-	Bukit Raya		-	-
31	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Semenisasi Jalan Agus Salim RT 002 Desa Bukit Raya (Kondisi Jalan Yang Rusak Sehingga Menghambat Aktifitas Warga)	-	Bukit Raya		-	-
32	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Lanjutan Semenisasi Gunung Gambar, kondisi jalan Gunung Gambar saat ini saat rusak terdapat banyak lobang di tepi jalan yang kiri kanannya terdapat jurang, jalan ini merupakan salah satu akses warga untuk ke kebun atau sawah, sangat susah di lewati jika kondisi habis hujan karena berlumpur,	-	Separi		-	-

		besar harapan warga agar jalan ini bisa di perbaiki atau di semenisasi agar mobilitas warga menjadi lancar terlebih untuk mengangkut hasil kebunnya untuk di jual					
33	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Lanjutan Semenisasi Jalan Gang Nangka RT 002 Desa Bukit Raya (Kondisi Jalan Rusak Sehingga Mengganggu Aktifitas Warga)	-	Bukit Raya		-	-
34	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Pembuatan Parit Jalan Agus Salim RT 020 Desa Bukit Raya (Sering Terjadinya Banjir Saat Musim Hujan)	-	Bukit Raya		-	-
35	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Pembuatan Parit Jalan Swakarsa RT 020 Desa Bukit Raya (Sering Terjadinya Banjir Saat Musim Hujan)	-	Bukit Raya		-	-
36	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Semenisasi Parit Lingkungan RT 006 Desa Bukit Raya (Sering Terjadinya Banjir Saat Musim Hujan)	-	Bukit Raya		-	-
37	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Semenisasi Parit Lingkungan RT 009 Desa Bukit Raya (Sering Terjadinya Banjir Saat Musim Hujan)	-	Bukit Raya		-	-
38	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Semenisasi Parit Lingkungan RT 018 Desa Bukit Raya (Sering Terjadinya Banjir Saat Musim Hujan)	-	Bukit Raya		-	-

39	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Semenisasi Parit Lingkungan RT 019 Desa Bukit Raya (Sering Terjadinya Banjir Saat Musim Hujan)	-	Bukit Raya		-	-
40	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Pelebaran Jalan Lampiri Pasar RT 019 Desa Bukit Raya (Sempitnya Jalan Sehingga Mengganggu Aktifitas Warga Terutama Saat Adanya Kegiatan Pasar Malam)	-	Bukit Raya		-	-
41	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Pembangunan Drainase RT 018 Desa Bukit Raya (Sering Terjadinya Banjir Saat Musim Hujan)	-	Bukit Raya		-	-
42	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Semenisasi Parit RT 019 Desa Bukit Raya (Sering Terjadinya Banjir Saat Musim Hujan)	-	Bukit Raya		-	-
43	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong	Semenisasi Parit RT 007 Desa Bukit Raya (Sering Terjadinya Banjir saat Musim Hujan)	-	Bukit Raya		-	-
44	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Semenisasi Parit RT 009 Desa Bukit Raya (Sering Terjadinya Banjir Saat Musim Hujan)	-	Bukit Raya		-	-
45	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Semenisasi Parit Sebelah Pak Iwan RT 019 Desa Bukit Raya (Sering Terjadinya Banjir Saat Musim Hujan)	-	Bukit Raya		-	-

46	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Semenisasi Parit Lingkungan RT 002 Desa Bukit Raya (Sering Terjadinya Banjir Saat Musim Hujan)	-	Bukit Raya		-	-
47	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Semenisasi Parit Gang Nangka RT 002 Desa Bukit Raya (Sering Terjadinya Banjir Saat Musim Hujan)	-	Bukit Raya		-	-
48	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Semenisasi Parit Lingkungan RT 006 Desa Bukit Raya (Sering Terjadinya Banjir Saat Musim Hujan)	-	Bukit Raya		-	-
49	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Semenisasi Parit Lingkungan RT 007 Desa Bukit Raya (Sering Terjadinya Banjir Saat Musim Hujan)	-	Bukit Raya		-	-
50	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Semenisasi Jalan Gang Sebelah Pusban RT 002 Desa Bukit Raya (Kondisi Jalan Rusak Sehingga Mengganggu Aktifitas Warga)	-	Bukit Raya		-	-
51	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Pembuatan Ruang Tunggu Posyandu RT 006 Desa Bukit Raya (Belum Ada Fasilitas Ruang Tunggu Diposyandu)	-	Bukit Raya		-	-
52	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Pembangunan Gedung RT 009 Desa Bukit Raya (Kondisi Gedung Yang Sudah Rusak)	-	Bukit Raya		-	-

53	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Pembuatan Gorong-gorong Jalan Usaha Tani RT 009 Desa Bukit Raya (Belum Adanya Gorong-gorong di Jalan Usaha Tani RT 009)	-	Bukit Raya		-	-
54	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Pembuatan Gorong-gorong Jalan RT 006 Desa Bukit Raya (Belum Adanya Gorong-gorong Jalan Di RT 006)	-	Bukit Raya		-	-
55	Fasilitasi Organisasi keolahragaan	BELUM ADANYA FASILITAS ORAGANISASI KEOLAHRAGAAN BAGI PEMUDA	-	Suka Maju		-	-
56	Pelatihan Anggota Organisasi Kepemudaan dalam berwirausaha	PERLU ADANYA PELATIHAN BERWIRA USAHA BAGI KEPEMUDAAN KARANG TARUNA DESA SUKA MAJU	-	Suka Maju		-	-
57	Pembangunan gedung perpustakaan desa/Kelurahan	BELUM MEMPUNYAI GEDUNG PERPUSTAKAAN	-	Suka Maju		-	-
58	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Lanjutan Pembuatan Parit Beton	-	Embalut		-	-
59	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Lanjutan Semenisasi Jl. Abdullah Sani	-	Embalut		-	-
60	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Pick Up)	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah	-	Embalut		-	Lengkapi Proposal

61	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Pembuatan Drainase Jalan Besar Bagian Kiri RT.11 sangat mendesak untuk di laksanakan mengingat wilayah RT.11 merupakan rawa-rawa yang selalu tergenang air terlebih pada saat hujan, selain tidak sehat karena terlihat kumuh juga menjadi sarang nyamuk, sehingga warga dari RT.11 sangat mengharapkan adanya drainase di sisi jalan agar genangan air dapat dialirkan ke sungai Separi sehingga warga bisa memanfaatkan pekarangan nya untuk hal-hal yang bermanfaat.	-	Separi		-	-
62	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Pembuatan Drainase Jalan Besar Bagian Kanan RT.11 sangat mendesak untuk di laksanakan mengingat wilayah RT.11 merupakan rawa-rawa yang selalu tergenang air terlebih pada saat hujan, selain tidak sehat karena terlihat kumuh juga menjadi sarang nyamuk, sehingga warga dari RT.11 sangat mengharapkan adanya drainase di sisi jalan agar genangan air	-	Separi		-	-

		dapat dialirkan ke sungai Separi sehingga warga bisa memanfaatkan pekarangan nya untuk hal-hal yang bermanfaat.					
63	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Pembuatan Drainase Jalan Besar Bagian Kiri RT.12 sangat mendesak untuk di laksanakan mengingat wilayah RT.12 merupakan rawa-rawa yang selalu tergenang air terlebih pada saat hujan, selain tidak sehat karena terlihat kumuh juga menjadi sarang nyamuk, sehingga warga dari RT.12 sangat mengharapkan adanya drainase di sisi jalan agar genangan air dapat dialirkan ke sungai Separi sehingga warga bisa memanfaatkan pekarangan nya untuk hal-hal yang bermanfaat.	-	Separi		-	-
64	Pembangunan/Rehabilitasi Lantai Jemur	Pembangunan Lantai Jemur Kelompok Tani	-	Embalut		-	-
65	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Pembuatan Drainase Jalan Besar Bagian Kanan RT.12 sangat mendesak untuk di laksanakan mengingat wilayah RT.12 merupakan rawa-rawa yang selalu tergenang air	-	Separi		-	-

		terlebih pada saat hujan, selain tidak sehat karena terlihat kumuh juga menjadi sarang nyamuk, sehingga warga dari RT.12 sangat mengharapkan adanya drainase di sisi jalan agar genangan air dapat dialirkan ke sungai Separi sehingga warga bisa memanfaatkan pekarangan nya untuk hal-hal yang bermanfaat.					
66	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Lanjutan Pembuatan Jalan Gang Kromo RT 007 Desa Bukit Raya (Kondisi Jalan Rusak Sehingga Mengganggu Aktifitas Warga)	-	Bukit Raya		-	-
67	Event Olahraga Tradisional dan Rekreasi	Event Balap Ketinting Desa Embalut	-	Embalut		-	-
68	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Penimbunan Jalan Usaha Tani RT 006 Desa Bukit Raya (Kondisi Jalan Yang Rusak dan Susah Dilalui Saat Musim Penghujan)	-	Bukit Raya		-	-
69	Pelatihan Scafolding	Pelatihan Scafolding untuk Peningkatan SDM	-	Embalut		-	-
70	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong	Semenisasi Parit RT 020 Desa Bukit Raya (Sering Terjadinya Banjir Saat Musim Hujan)	-	Bukit Raya		-	-
71	Pelatihan Rigger	Pelatihan Rigger untuk Peningkatan SDM	-	Embalut		-	-
72	Pelatihan Foklift	Pelatihan Foklift untuk	-	Embalut		-	-

		Peningkatan SDM					
73	Pelatihan Mekanik Alat Berat	Pelatihan Mekanik Alat Berat untuk Peningkatan SDM	-	Embalut		-	-
74	Pelatihan Instrumen Level 1	Pelatihan Instrumen Level 1 untuk peningkatan SDM	-	Embalut		-	-
75	Pelatihan Ahli K3 Umum	Pelatihan Ahli K3 Umum untuk Peningkatan SDM	-	Embalut		-	-
76	Diksar Gada Pratama	Pelatihan Diksar Gada Pratama untuk Penongkatan SDM	-	Embalut		-	-
77	Pelatihan Welder 3G	Pelatihan Welder 3G untuk Peningkatan SDM	-	Embalut		-	-
78	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Rehab Atap Masjid Al-Isra'	-	Embalut		-	-
79	Pelatihan Kelompok Seni Tradisional (Sekolah/Masyarakat), Pemilihan Duta Budaya	Pelatihan Kelompok Seni Tradisional	-	Embalut		-	-
80	Pembangunan Ruang Kelas/Guru PAUD	Perlunya bangunan Ruang Kelas & Guru PAUD yang memadai	-	Embalut		-	-
81	Pengadaan Mebel PAUD (Pengadaan Meja kursi Guru, Meja kursi Siswa, Lemari rak buku, lemari file,)	Pengadaan Mebel PAUD	-	Embalut		-	-
82	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Normalisasi Saluran Drainase Desa Embalut	-	Embalut		-	Perbaiki dokumen Usulan
83	Pembangunan dan Perbaikan MCK Umum/Komunal Kecamatan Tenggarong Seberang	Pembangunan MCK Umum Desa Embalut	-	Embalut		-	usulan belum mengambarkan dengan jelas kebutuhan MCK komunal

84	Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) di Kecamatan Tenggarong Seberang	Pembangunan Gedung Taman Pendidikan Al-Qur'an	-	Embalut		-	-
85	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Perbaikan semenisasi Jl. H.Syahrudin	-	Embalut		-	-
86	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	TIDAK ADANYA LAPANGAN SEPAKBOLA MILIK DESA SEHINGGA MASYARAKAT KESULITAN BEROLAHRAGA, DAN KURANGNYA PENDUKUNG SEPERTI BAJU BOLA SEPATU UNTUK MENUNJANG KEGIATAN OLAHRAGA	-	Teluk Dalam		-	Lengkapi peta lokasi
87	Penyediaan Pakan Ikan	KESULITAN MAHALANYA HARGA PAKAN UNTUK IKAN SEHINGGA MEMBUAT PENGUSAHA KERAMBA MENGHASILKAN KEUNTUNGAN SEDIKIT	-	Teluk Dalam		-	-
88	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong Seberang	JALAN YANG ADA BELUM DI SEMENISASI SEHINGGA MASYARAKAT KESULITAN MELEWATINYA	-	Teluk Dalam		-	-
89	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	PARIT YANG ADA BELUM PASANGAN BATU	-	Teluk Dalam		-	-

90	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong Seberang	jalan blok-blok kuburan masih tanah sehingga membuat masyarakat kesulitan melewatinya	-	Teluk Dalam		-	-
91	Pembekalan Barista	MASIH SEDIKIT YANG BELUM MEMILIK PEKERJAAN SEHINGGA DEMI MENINGKATKAN SKILL	-	Teluk Dalam		-	-
92	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong Seberang	JALAN YANG ADA BELUM SEMENISASI SEHINGGA MASYARAKAT SEKITAR KESULITAN MELEWATI	-	Teluk Dalam		-	-
93	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	JALAN YANG ADA BELUM SEMENISASI SEHINGGA MASYARAKAT KESULITAN MELEWATINYA	-	Teluk Dalam		-	-
94	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Lanjutan Semenisasi Jl. Awang Banjar	-	Embalut		-	-
95	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong Seberang	JALAN YANG ADA BELUM DI SEMENISASI	-	Teluk Dalam		-	-
96	Pembekalan Barber Shop	DEMI MENGURANGI PENGANGGURAN SEHINGGA MEMOHON UNTUK PENINGKATAN SKILL	-	Teluk Dalam		-	-

97	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	1. Kondisi Jalan saat ini masih berupa tanah bebatuan. 2. Jalan sangat berdebu di musim kemarau dan becek di musim hujan. 3. Terjadi pengikisan tanah yang berkepanjangan.	-	Loa Raya		-	-
98	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Lanjutan Pembangunan Gedung Futsal Desa Bukit Raya (Perlu Adanya Gedung Futsal Untuk Menunjang Fasilitas Olahraga Di Desa Bukit Raya)	-	Bukit Raya		-	-
99	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	1. Kondisi Jalan saat ini masih berupa tanah bebatuan. 2. Jalan sangat berdebu di musim kemarau dan becek di musim hujan. 3. Terjadi pengikisan tanah yang berkepanjangan.	-	Loa Raya		-	-
100	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong Seberang	1. Kondisi Jalan saat ini rusak berat serta berlubang sehingga membahayakan bagi pengendara. 2. Jalan sangat berdebu di musim kemarau dan becek di musim hujan. 3. Terjadi pengikisan tanah yang berkepanjangan.	-	Loa Raya		-	-

101	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong Seberang	1. Kondisi Jalan saat ini tidak nyaman untuk dilalui oleh pengendara akibat dari jalan yang tertutup oleh tanaman liar sehingga membahayakan bagi pengendara. 2. Terjadi pengikisan tanah yang berkepanjangan. 3. Jalan sangat becek di musim hujan karena masih berupa tanah bebatuan.	-	Loa Raya		-	-
102	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	1. Kondisi Jalan saat ini tidak nyaman untuk dilalui oleh pengendara akibat dari jalan yang tertutup oleh tanaman liar sehingga membahayakan bagi pengendara. 2. Terjadi pengikisan tanah yang berkepanjangan. 3. Jalan sangat becek di musim hujan karena masih berupa tanah bebatuan.	-	Loa Raya		-	-
103	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	1. Kondisi Parit saat ini terjadi kedangkalan karena longsoran tanah dari sekitar jalan dan bila musim hujan parit tersebut aliran airnya agak lambat. 2. Terjadi pengikisan tanah yang berkepanjangan.	-	Loa Raya		-	-

104	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	1. Kondisi Parit saat ini terjadi kedangkalan karena longsoran tanah dari sekitar jalan dan bila musim hujan parit tersebut aliran airnya agak lambat. 2. Terjadi pengikisan tanah yang berkepanjangan.	-	Loa Raya		-	-
105	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	1. Kondisi Jalan saat ini tidak layak dengan kondisi jalan berbatuan sehingga membahayakan bagi pengendara. 2. Jalan sangat berdebu di musim kemarau dan becek/licin di musim hujan. 3. Terjadi pengikisan tanah yang berkepanjangan.	-	Loa Raya		-	-
106	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Kondisi sungai saat ini terjadi pendangkalan di karenakan longsoran tanah dari sekitar jalan dan bila musim hujan, aliran airnya akan tersumbat.	-	Loa Raya		-	-
107	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	1. Kondisi Jalan saat ini masih berupa tanah bebatuan. 2. Jalan sangat berdebu di musim kemarau dan becek/licin di musim hujan. 3. Terjadi pengikisan tanah yang berkepanjangan.	-	Loa Raya		-	-

108	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	1. Kondisi Jalan saat ini masih berupa tanah bebatuan. 2. Jalan sangat berdebu di musim kemarau dan becek/licin di musim hujan. 3. Terjadi pengikisan tanah yang berkepanjangan.	-	Loa Raya		-	-
109	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong Seberang	1. Kondisi Jalan saat ini masih berupa tanah bebatuan. 2. Jalan sangat berdebu di musim kemarau dan becek/licin di musim hujan. 3. Terjadi pengikisan tanah yang berkepanjangan. 4. Menyulitkan petani untuk mengangkut hasil kebun/sawah.	-	Loa Raya		-	-
110	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	1. Kondisi Parit saat ini terjadi kedangkalan karena longsoran tanah dari sekitar jalan dan bila musim hujan parit tersebut aliran airnya agak lambat. 2. Terjadi pengikisan tanah yang berkepanjangan.	-	Loa Raya		-	-
111	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	1. Kondisi Parit saat ini terjadi kedangkalan karena longsoran tanah dari sekitar jalan dan bila musim hujan parit tersebut aliran airnya agak lambat. 2. Terjadi	-	Loa Raya		-	-

		pengikisan tanah yang berkepanjangan. 3. Aliran yang tidak optimal menyebabkan sawah tidak mendapat pengairan yang optimal.					
112	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Kondisi Parit saat ini terjadi kedangkalan karena longsoran tanah dari sekitar jalan dan bila musim hujan aliran airnya akan meluap ke jalan.	-	Loa Raya		-	-
113	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	1. Kondisi Jalan saat ini masih berupa tanah bebatuan. 2. Jalan sangat berdebu di musim kemarau dan becek/licin di musim hujan. 3. Terjadi pengikisan tanah yang berkepanjangan. 4. Menyulitkan para pekebun untuk mengangkut hasil panennya.	-	Loa Raya		-	-
114	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	1. Kondisi Jalan saat ini rusak berat dengan kondisi jalan tanah berbatuan sehingga membahayakan bagi pengendara. 2. Jalan sangat berdebu di musim kemarau dan becek di musim hujan. 3. Terjadi pengikisan tanah yang berkepanjangan.	-	Loa Raya		-	-

115	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Pembuatan Jembatan Ulin 2 Jalan Entapi sangat di harapkan agar terealisasi agar memudahkan aktivitas para petani ketika akan ke sawah karena jalan yang dilewati tersebut dibeberapa titik melewati kali atau jalur air sehingga dibuatkan jembatan dengan ala kadarnya yang tidak kokoh dan rawan rusak ketika banjir karena arus lumayan deras, dengan terbangunnya jembatan ulin ini maka aktivitas petani menjadi lancar, karena jalan ini merupakan akses utama petani menuju ke sawahnya	-	Separi		-	"Tidak sesuai kamus usulan dan lokus. Kamus usulan Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter) usulan berupa JALAN JEMBATAN, bukan JEMBATAN. Lokus di Muara Kaman, Muara Muntai, Muara Wis."
116	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Pembuatan Jembatan Ulin 3 Jalan Entapi sangat di harapkan agar terealisasi agar memudahkan aktivitas para petani ketika akan ke sawah karena jalan yang dilewati tersebut dibeberapa titik melewati kali atau jalur air sehingga dibuatkan jembatan dengan ala kadarnya yang tidak kokoh dan rawan rusak ketika banjir karena arus lumayan deras, dengan terbangunnya jembatan ulin ini maka aktivitas petani menjadi lancar, karena jalan ini	-	Separi		-	"Tidak sesuai kamus usulan dan lokus. Kamus usulan Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter) usulan berupa JALAN JEMBATAN, bukan JEMBATAN. Lokus di Muara Kaman, Muara Muntai, Muara Wis."

		merupakan akses utama petani menuju ke sawahnya					
117	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Prestasi	Pembangunan Lapangan Bola Voli Tim Putra Putri Desa Separi sangat di nantikan pembangunan nya oleh para pemuda pemudi Desa Separi yang nantinya akan dijadikan tempat latihan, karena mereka selama ini memakai lapangan yang memang sudah kurang layak dijadikan tempat latihan, terdapat banyak retakan di lapangan, oleh karena itu mereka memerlukan lapangan yang lebih bagus, lebih memadai dan membuat mereka nyaman dalam berlatih agar kedepannya lebih berprestasi	-	Separi		-	-
118	Pembangunan Pos Keamanan di Kecamatan Tenggarong Seberang	Kenakalan remaja meningkat setiap tahun, balapan liar, narkotika dan lain-lain	-	Buana Jaya		-	-

119	Pengadaan Madu Kelulut (Kelenceng)	Peningkatan hasil hutan selain kayu sangat diperlukan anggota	-	Buana Jaya		-	-
120	Penyediaan Benih Ikan / Udang	Pokdakan Sarining Toya belum mampu membuat benih ikan sendiri, bibit ikan. konsumsi ikan air tawar di masyarakat cenderung meningkat	-	Buana Jaya		-	-
121	Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir	Permasalahan utama pertanian di Bhuana jaya adalah pengendalian air, saat musim hujan banjir tidak terkendali, saat kemarau kekeringan, sedimentasi sangat cepat terjadi	-	Buana Jaya		-	-
122	Pelatihan Kelompok Tani (Poktan)	Perlu pelatihan / Bintek poktan terkait kegiatan pertanian guna meningkatkan sumber daya manusia sebagai petani modern	-	Suka Maju		-	Lengkapi peta lokasi, proposal dan foto lokasi
123	Pelatihan Mekanik Alat Berat	masih banyak pemuda Desa Suka Maju yang perlu pelatihan mekanik alat berat	-	Suka Maju		-	Lengkapi peta lokasi, proposal dan foto lokasi
124	Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR)	Relawan REDKAR Desa Suka Maju belum pernah mengikuti pelatihan	-	Suka Maju		-	-
125	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	perlu dibangunya BPU / Aula Kantor Desa Suka Maju	-	Suka Maju		-	usulan tidak dilengkapi dokumen pendukung
126	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	perlu dibangunya jalan Perkebunan Karet	-	Suka Maju		-	Lengkapi peta lokasi, proposal dan foto lokasi

127	Pembangunan Ruang Kelas/Guru PAUD	perlu penambahan Ruang Kelas TK Mekar Sari	-	Suka Maju		-	Lengkapi peta lokasi, proposal dan foto lokasi
128	Pemeliharaan Bangunan Chek Dam dan Saluran Check Dam Dengan Lebar Saluran Lebih Dari 4 Meter	perlu pemeliharaan / rehab chek dam dikarenakan amblas dan terkikis oleh air	-	Suka Maju		-	usulan tidak dilengkapi dokumen pendukung
129	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)	perlu adanya alat pengangkut sampat besar (Dump Truck)	-	Suka Maju		-	Lengkapi peta lokasi, proposal
130	Pengadaan Madu Kelulut (Kelenceng)	perlu budi daya madu kelulut sebagai penambahan Ekonomi	-	Suka Maju		-	Lengkapi peta lokasi, proposal
131	Pengadaan Mesin Paving Block Sampah	belum mempunyai mesin pembuat Paving Block Dari Sampah Plastik	-	Suka Maju		-	Lengkapi peta lokasi, proposal
132	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	pembangunan sarana olah Raga Lapangan Sepak Bola	-	Suka Maju		-	-
133	Pengadaan Mesin Pompa	perlu pengadaan mesin pompa air untuk membantu petani menyalurkan air di persawahan	-	Suka Maju		-	Lengkapi data pendukung : proposal/surat permohonan/volume/dimensi (PxLxT) pekerjaan, titik koordinat dan dokumentasi (foto lokasi).
134	Pengadaan Sambungan Rumah (SR)	perlu banyaknya pengadaan SR bagi penyaluran air bersih PAMSIMAS TIRTO WALUYO	-	Suka Maju		-	Lengkapi data pendukung : proposal/surat permohonan/volume/dimensi (PxLxT) pekerjaan, titik koordinat dan dokumentasi (foto lokasi).
135	Pengadaan Tower Repaeter / Penguat Sinyal	perlu pengadaan tower penguat signal pada	-	Suka Maju		-	Lengkapi peta lokasi, proposal

		zona Blank Spot					
136	Pengembangan Sawit Rakyat (Pengadaan Bibit Sawit/Ha)	perlu pengadaan bibit sawit bagi perkebunan di sekitar pemukiman yang msh terlantar tanpa tanaman	-	Suka Maju		-	Lengkapi peta lokasi, proposal
137	Peningkatan Jaringan Irigasi dibawah 1000 Ha	perlu peingkatan jaringan irigasi yang memadai bagi petani sawah	-	Suka Maju		-	usulan tidak dilengkapi dokumen pendukung
138	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren (hibah uang)	perlu perlengkapan sarana dan prasarana pondok pesantren nurussalam	-	Suka Maju		-	-
139	Penyediaan Alat Kesenian	perlu pengadaan alat kesenian yang baru sebagai pengganti yang sudah lama	-	Suka Maju		-	Lengkapi peta lokasi, proposal
140	Penyediaan Pakan Ikan	perlu penyediaan atau bantuan pakan ikan bagi pembudidaya ikan yang ada di desa suka maju	-	Suka Maju		-	Lengkapi peta lokasi, proposal
141	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Rambu, Marka, ZOSS (Zona Selamat Sekolah) dan Paku Marka)	PERLU PENGADAAN RAMBU JALAN ZEBRA CROSS DAN LAIN SEBAGAINYA UNTUK JALAN SEKOLAH TK SD MTS MA	-	Suka Maju		-	usulan tidak dilengkapi dokumen pendukung
142	Penyediaan Unit Keramba	perlu penyediaan keramba untuk kelompok perikanan yang ada didesa suka maju	-	Suka Maju		-	Lengkapi peta lokasi, proposal dan foto lokasi

143	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Semenisasi Jalan Dusun Sumber Rejo (akses jalan kurang memadai)	-	Bangun Rejo		-	-
144	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	belum ada Saluran Parit Permanen (Beton)	-	Perjiwa		-	-
145	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Belum Adanya Badan Jalan	-	Perjiwa		-	-
146	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Belum Ada Badan Jalan	-	Perjiwa		-	-
147	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Belum Ada BPU Desa	-	Perjiwa		-	-
148	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Kondisi Jalan Desa Rusak Parah	-	Perjiwa		-	-
149	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Kondisi Jalan Saat Ini Rusak	-	Perjiwa		-	-
150	Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) di Kecamatan Tenggarong Seberang	Kondisi Bangunan Sekarang Rusak dan Bocor	-	Perjiwa		-	-
151	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Semenisasi Jalan Dusun Sumber Rejo (akses jalan kurang memadai)	-	Bangun Rejo		-	Tolong lengkapi foto yang disertai koordinat lokasi yang dimaksud

152	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Pembangunan Jembatan Beton Buk Petung (Akses jalan kurang memadai karena masih berupa jembatan kayu yang rawan rusak)	-	Bangun Rejo		-	titik koordinat tidak akurat (mengarah ke lapangan bola L3), sehingga tidak mengarah ke lokasi yang dimaksud. Saran : upload ulang foto dokumentasi sesuai koordinat yang akurat
153	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Lanjutan Semenisasi Jalan Latsitarda II (akses jalan kurang memadai)	-	Bangun Rejo		-	-
154	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	1. Kondisi Jalan saat ini masih berupa tanah bebatuan. 2. Jalan sangat berdebu di musim kemarau dan becek di musim hujan. 3. Terjadi pengikisan tanah yang berkepanjangan.	-	Loa Raya		-	-
155	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Lanjutan Semenisasi Jalan Usaha Tani RT. 31 menuju RT. 14 (akses jalan kurang memadai)	-	Bangun Rejo		-	-
156	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Pengurukan Jalan Usaha Tani Latsitarda I (akses jalan kurang memadai)	-	Bangun Rejo		-	-
157	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Jalan Usaha Tani di Kelompok Tani Hutan Tuah Himba masih sangat jauh dari kata layak, Jalan bergelombang, berlubang dan tekstur lempung yang sangat licin saat hujan turun.	-	Buana Jaya		-	-

158	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	kiri kanan sungai longsor	-	Buana Jaya		-	-
159	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Air hujan, air tambang dan hujan menjadi permasalahan utam tiga kelompok tani di Desa Bhuana jaya yaitu Poktan Bhinnika Jaya, Sidomakmur dan Sumber Rejo. menyebabakan gagal panen dan tanam berulang	-	Buana Jaya		-	-
160	Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir	Sungai Sidomakmur adalah salah satu penyebab banjir di Kelompok Tani Sumber Rejo, Sangkuriang Sakti A dan Sangkuriang Sakti B	-	Buana Jaya		-	-
161	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	1. Kondisi Jalan saat ini masih berupa tanah bebatuan. 2. Jalan sangat berdebu di musim kemarau dan becek serta licin di musim hujan. 3. Terjadi pengikisan tanah yang berkepanjangan. 4. Menyulitkan masyarakat mengangkut hasil kebun	-	Loa Raya		-	-
162	Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir	Sungai Bhuana jaya merupakan salah satu penyebab banjir Kelompok Tani Bhinnika Jaya, Makarti MUkti Tama, Bi na Harapan	-	Buana Jaya		-	-

		Jaya dan Mukti Jaya					
163	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	1. Kondisi Jalan saat ini masih berupa tanah bebatuan. 2. Terjadi pengikisan tanah yang berkepanjangan. 3. Jalan sangat berdebu di musim kemarau dan becek di musim hujan.	-	Loa Raya		-	-
164	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Jalan Usaha Tani di Kelompok Tani Dewi Sri masih sangat jauh dari kata layak, Jalan bergelombang, berlubang dan tekstur lempung yang sangat licin saat hujan turun	-	Buana Jaya		-	-
165	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Adapun jalan yang dilalui warga setempat saat ini sering terjadi genangan air yang menggangu aktifitas warga sehari hari di kala musim penghujan turun, juga genangan air ini dapat merusak jalan pemukiman jika tidak segera ditangani.	-	Buana Jaya		-	-
166	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Prestasi	1. Kondisi Lapangan Sepak Bola saat ini belum maksimal sebagai wadah kegiatan masyarakat. 2. Ketidaktersediaannya Lampu sebagai bagian dari fasilitas lapangan. 3. Kondisi	-	Loa Raya		-	-

		drainase yang belum optimal.					
167	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Adapun jalan yang dilalui warga sering terjadi genangan air saat hujan turun sehingga mengganggu aktifitas warga setempat, juga dapat merusak jalan	-	Buana Jaya		-	-
168	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Prestasi	Tribun saat ini hanya tersedia di satu sisi lapangan saja.	-	Loa Raya		-	-
169	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Dikarnakan Jalan Yang Sempit	-	Buana Jaya		-	-
170	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Belum Turap Area tersebut	-	Buana Jaya		-	-
171	Penyediaan Mesin Kapal/Perahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT	Pemenuhan kebutuhan Kelompok Usaha Bersama "EMOLIS" berupa Mesin Diesel 24 PK ini dirasa sangat penting dan mendesak guna mendukung kelancaran usaha, kegiatan usaha kelompok ini berkonsep Bioflok untuk memanfaatkan lahan yang ada agar bernilai ekonomis serta meningkatkan perekonomian anggotanya.	-	Separi		-	-

172	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Belum adanya Turap di saluran air samping Gedung TK Nusa Indah	-	Buana Jaya		-	-
173	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Jembatan rusak parah, membahayakan pengguna terutama petani Kelompok Tani Sidomakmur Desa Bhuana Jaya	-	Buana Jaya		-	-
174	Rehabilitasi Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Kantor BPD dan LPM sudah lapuk dan memrlukan rehabilitasi	-	Buana Jaya		-	-
175	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Peningkatan Jalan 130 M RT.08 masi sangat jauh dari kata layak, Jalan berlubang dan bergelombang	-	Buana Jaya		-	-
176	Pelatihan Kelompok Tani (Poktan)	Kemampuan tekhnologi Petani di Desa Bhuana jaya masih kurang memadai, sawah di Desa Bhuana jaya sangat luas dan produksi kurang maksimal	-	Buana Jaya		-	-
177	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Belum Adanya Gedung Kesenian di Desa Sebagai Sarana dan Prasara Pentas Seni dan Budaya	-	Kerta Buana		-	-
178	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Merupakan akses Jalan umum masyarakat	-	Buana Jaya		-	-
179	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	'Pembangunan Turap Sungai Alam Desa Bangun Rejo (Mencegah Terjadinya Longsor)	-	Bangun Rejo		-	-

180	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Jika Turap Kantor Desa Bagian Timur dapat dilaksanakan maka dalam hal ini bisa menciptakan rasa aman dari bahaya longsor tanah	-	Kerta Buana		-	-
181	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Pemasangan Bronjong Batu Turap Sungai Alam Antara Desa Bangun Rejo dan Embalut (Mencegah Terjadinya Longsor)	-	Bangun Rejo		-	-
182	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Jika Pembangunan kantor Desa Kerta Buana dapat dilaksanakan maka dalam hal ini bisa dimanfaatkan Oleh perangkat Desa agar dapat memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat	-	Kerta Buana		-	-
183	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Lanjutan Pembangunan Masjid Al-Amin RT. 07 Desa Bangun Rejo (Meningkatan pembangunan prasarana ibadah	-	Bangun Rejo		-	-
184	Penyediaan Unit Keramba	Tersedianya lahan/lokasi yang dapat digunakan sebagai tempat budidaya ikan namun terdapat kendala modal dalam memulai usaha budidaya ikan tersebut	-	Loa Raya		-	-
185	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Beluam adanya turap area tersebut sehingga ketika hujan turun dan air mengalir deras mengakibatkan tanah kanan	-	Buana Jaya		-	-

		kiri menjasi longsor					
186	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Peningkatan Jalan RT.17 masi sangat jauh dari kata layak, jalan berlubang, bergelombang, tekstur lempung yang sangat licin saat hujan turun	-	Buana Jaya		-	-
187	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Peningkatan Jl RT.10 Menuju RT.13 200 M masi sangat jauh dari kata layak, jalan berlubang, bergelombang tekstur lempung yang sangat licin saat hujan turun	-	Buana Jaya		-	-
188	Event Olahraga Wisata, Tantangan dan Pertualangan	Penyelengaraan wisata masih terkendala fasilitas yang belum memadai	-	Buana Jaya		-	-
189	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Produksi padi Kelompok Tani Bhinnika Jaya tidak bisa maksimal karena drainase terganggu sedimentasi	-	Buana Jaya		-	-
190	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Pembuatan Gorong-gorong Jalan Usaha Tani RT 017 Desa Bukit Raya (Kurang Lancarnya Pengaliran Parit di Persawahan maka sangat dibutuhkanny a gorong-gorong untuk memperlancar pengaliran air dipersawahan)	-	Bukit Raya		-	-
191	Pembangunan/Rehabilitasi Lumbung Pangan	Petani tidak bisa mengeringkan gabah saat cuaca mendung atau	-	Buana Jaya		-	-

		hujan,kualitas gabah menurun harga menjadi rendah					
192	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Pembuatan Gorong-gorong Jembatan Jalan Usaha Tani RT 004 Desa Bukit Raya (Kurang lancarnya pengaliran air diparit persawahan sehingga diperlukannya gorong-gorong untuk memperlancar pengaliran air parit dipersawahan)	-	Bukit Raya		-	-
193	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Pembuatan Gorong-gorong Jembatan Jalan Usaha Tani RT 003 Desa Bukit Raya (Kurang Lancarnya Pengaliran Air Dipersawahan Sehingga Diperlukannya Gorong-gorong Untuk Memperlancar Pengaliran Air Parit Dipersawahan)	-	Bukit Raya		-	-
194	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Peningkatan Jalan Usaha Tani RT 001 Desa Bukit raya (Kondisi Jalan yang rusak dan susah dilalui saat musim penghujan)	-	Bukit Raya		-	-
195	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Peningkatan Jalan Usaha Tani RT 003 Desa Bukit Raya (Kondisi jalan yang rusak dan susah dilalui saat musim penghujan)	-	Bukit Raya		-	-
196	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Peningkatan Jalan Usaha Tani RT 004 Desa Bukit Raya (Kondisi jalan yang rusak dan susah dilalui saat hujan)	-	Bukit Raya		-	-

197	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Peningkatan Jalan Usaha Tani RT 005 Desa Bukit Raya (Kondisi jalan yang rusak dan susah dilalui saat hujan)	-	Bukit Raya		-	-
198	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Peningkatan Jalan Kelompok Tani (Rawa Makmur) (akses jalan kurang memadai)	-	Bangun Rejo		-	-
199	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Mesin Pompa, Selang, Nozle, Conection, baju tahan panas, sepatu, helm) (Karhutla)	Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (Belum tersedianya mobil pemadam kebakaran di desa)	-	Bangun Rejo		-	-
200	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (photografi, film, musik)	Pelatihan Desain Grafis dan Percetakan (Meningkatkan produktivitas usaha)	-	Bangun Rejo		-	-
201	Fasilitasi Organisasi keolahragaan	Turnamen Sepak Bola (Minimnya operasional kegiatan turnamen)	-	Bangun Rejo		-	-
202	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Pick Up)	Masalah sampah menjadi fenomena yang memerlukan penanganan sesegera mungkin	-	Buana Jaya		-	-
203	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Sering menyebabkan banjir karena sedimentasi yang cepat	-	Buana Jaya		-	-
204	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	sedimentasi yang sangat cepat menghambat laju air	-	Buana Jaya		-	-

205	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Laju air terhambat karena sedimentasi yang cepat	-	Buana Jaya		-	-
206	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Jalan masuk RT 19 Dusun Sidomakmur berada di tepi tebing yang curam dan membahayakan pemakai jalan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Buana Jaya		1	-
207	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Lanjutan Pengaspalan Jalan RT 19 yang belum kelar	-	Buana Jaya		-	-
208	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Drainase belum memadai, masih sering terjadi luapan hingga ke jalan saat hujan	-	Buana Jaya		-	-
209	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Belum ada parit untuk pembuangan limbah rumah tangga warga sekitar RT 17	-	Buana Jaya		-	-
210	Penyediaan Benih Ikan / Udang	Belum Tersedianya Gapura Sebagai Ikon Perbatasan Desa Tanjung Batu Dan Manunggal Jaya Perlu Mengajukan : Proposal Pembangunan Gapura Gerbang Perbatasan Desa Tanjung Batu Dan Manunggal Jaya	-	Tanjung Batu		-	-

211	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	TSM adalah pemukiman paling dalam dan terpisah daru Desa Induk, jalan menuju TSM RT 06 masih belum bagus dan terlalu sempit	-	Buana Jaya		-	-
212	Penyediaan Pakan Ikan	Mahalnya Harga Pakan Ikan di Pasaran (Bantuan Pakan Ikan) Maka Perlu Mengajukan : Proposal Bantuan Pakan Ikan Pokdakan (3 Kelompok Budidaya Ikan)	-	Tanjung Batu		-	-
213	Penyediaan Benih Ikan / Udang	Belum tersedianya benih ikan bermutu dan berkualitas Maka Perlu Mengajukan : Proposal Bantuan Bibit Ikan Unggulan Pokdakan (3 Kelompok Budidaya Ikan)	-	Tanjung Batu		-	-
214	Penyediaan Kolam Terpal	Kurangnya sarana/prasarana kelompok Pembudidaya Ikan Maka perlu Pengajuan : Proposal Bantuan Pakan Ikan Pokdakan (3 Kelompok Budidaya Ikan)	-	Tanjung Batu		-	-
215	Pengadaan bibit Ternak Kerbau	Peningkatan perekonomian masyarakat desa : Proposal Penyediaan Bibit Ternak Kerbau kelompok Anugrah Rapak Makmur	-	Tanjung Batu		-	-
216	Pengadaan bibit Ternak Kerbau	Peningkatan Tarap Hidup masyarakat : Proposal Penyediaan Bibit Ternak	-	Tanjung Batu		-	-

		Sapi Kelompok Karya Mandiri					
217	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Prasarana Desa yang rusak/kurang memadai : Proposal Turap Jalan H. Awang Saleh	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tanjung Batu		1	-
218	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Jembatan Sungai Separi Anak dan cabangnya tidak memadai untuk menanggung beban kegiatan Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Wisata utama di Bhuana jaya.	-	Buana Jaya		-	-
219	Rehabilitasi Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Prasarana Desa yang rusak/kurang memadai : Proposal Rehab Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU)	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten /Kota	Tanjung Batu		-	data belum lengkap. silahkan melengkapi data Legalitas kepemilikan aset tanah Pemda.
220	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Jembatan Sungai Separi Anak dan Anak cabangnya tidak memadai untuk menanggung beban kegiatan warga dalam aktifitas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Wisata yang dilaksanakan di daerah tersebut	-	Buana Jaya		-	-

221	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Tidak tersedianya prasarana fasilitas Musyawarah Desa : Proposal Pembangunan Pendopo Pertemuan Desa	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Tanjung Batu		-	data belum lengkap. silahkan melengkapi data Legalitas kepemilikan aset tanah Pemda.
222	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Rehabilitasi Jembatan RT. 03 (akses jalan kurang memadai)	-	Bangun Rejo		-	-
223	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Jembatan yang menghubungkan RT 06 TSM dengan Desa Induk Bhuana jaya mengalami abrasi dan rusak parah. membahayakan pengguna	-	Buana Jaya		-	-
224	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Pembangunan Jembatan Jalan Tsani Kharim (akses jalan kurang memadai)	-	Bangun Rejo		-	-
225	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	1. Kondisi Jalan saat ini masih berupa tanah bebatuan. 2. Jalan sangat berdebu di musim kemarau dan becek/licin di musim hujan. 3. Terjadi pengikisan tanah yang berkepanjangan	-	Loa Raya		-	-
226	Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir	Normalisasi Sungai Alam se-Desa Bangun Rejo (Meningkatkan	-	Bangun Rejo		-	-

		kapasitas sungai)					
227	Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir	Normalisasi Sungai Alam (Batas DAM Bangun Rejo) (Meningkatkan Kapasitas Sungai)	-	Bangun Rejo		-	Lengkapi peta lokasi
228	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Belum tersedianya Jalan Penghubung ke Desa Loa Ulung : Proposal Pembangunan Badan Jalan Taher Bin Umar	-	Tanjung Batu		-	-
229	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Belum adanya Jalan Desa yang memadai : Proposal Pengerasan Badan Jalan Idaman	-	Tanjung Batu		-	-
230	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	1. Kondisi Jalan saat ini masih berupa tanah bebatuan. 2. Jalan sangat berdebu di musim kemarau dan becek/licin di musim hujan. 3. Terjadi pengikisan tanah yang berkepanjangan.	-	Loa Raya		-	-
231	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Gorong-gorong di area Blackstone Geopark sudah rusak parah dan miring, membahayakan pengguna	-	Buana Jaya		-	-
232	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Gorong-gorong Kelompok Tani Sri Lemah Sejati menopang kegiatan Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Wisata sudah rusak	-	Buana Jaya		-	-

		dan goyang. membahayakan pengguna					
233	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Peningkatan Jalan Usaha Tani RT 016 Desa Bukit Raya (Kondisi Jalan Rusak dan susah dilalui saat hujan)	-	Bukit Raya		-	-
234	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Peningkatan Jalan Usaha Tani RT 017 Desa Bukit Raya (Kondisi jalan rusak dan susah dilalui saat hujan)	-	Bukit Raya		-	-
235	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong	Belum ada turab	-	Buana Jaya		-	Kecamatan Tenggarong Seberang
236	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Semenisasi Jalan Kauman RT 001 Desa Bukit Raya (Kondisi Jalan Rusak dan Susah Dilalui Saat Hujan)	-	Bukit Raya		-	-
237	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Semenisasi Jalan Merdeka RT 017 Desa Bukit Raya (Kondisi Jalan Rusak dan Susah Dilalui Saat Hujan)	-	Bukit Raya		-	-
238	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	1. Kondisi Parit saat ini terjadi kedangkalan karena longsoran tanah dari sekitar jalan dan bila musim hujan parit tersebut aliran airnya agak lambat. 2. Terjadi pengikisan tanah yang	-	Loa Raya		-	-

		berkepanjangan.					
239	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Semenisasi Jalan TMMD RT 004, RT 005 dan RT 017 Desa Bukit Raya (Kondisi Jalan Rusak dan Susah Dilalui Saat Hujan)	-	Bukit Raya		-	-
240	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Kondisi parit saat ini terjadi pendangkalan di karenakan longsoran tanah dari sekitar jalan dan bila musim hujan, aliran airnya akan tersumbat.	-	Loa Raya		-	-
241	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong Seberang	1. Kondisi Jalan saat ini masih berupa tanah bebatuan. 2. Jalan sangat berdebu di musim kemarau dan becek/licin di musim hujan. 3. Terjadi pengikisan tanah yang berkepanjangan.	-	Loa Raya		-	-
242	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Belum tersedianya akses jalan Desa yang memadai : Proposal Pengerasan Jalan M. Amiril Bin Adan	-	Tanjung Batu		-	-
243	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Akses jalan yang rusak : Proposal Pengaspalan Jalan H. Awang Saleh	-	Tanjung Batu		-	-

244	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Belum tersedianya jalan desa yang memadai : Proposal Pengerasan Jalan Palajawan 1	-	Tanjung Batu		-	-
245	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Belum tersedianya Jalan Desa yang memadai : Proposal Semenisasi Jalan Imam Sahak	-	Tanjung Batu		-	-
246	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Belum tersedianya akses jaln desa yang memadai : Proposal Peningkatan Badan Jalan Adan Bin Sidiq	-	Tanjung Batu		-	-
247	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Belum adanya sarana olahraga yang permanen di desa untuk sarana olahraga mayarakat : Proposal Pembuatan lapangan Volly	-	Tanjung Batu		-	-
248	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Drainase RT 10 sangat diperlukan sekali guna mengatasi banjir dimusim hujan	-	Buana Jaya		-	-
249	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Area lapangan yang Becek terkena genangan air hujan : Proposal Pemasangan Paving Block Area/Halaman Lapangan Volly	-	Tanjung Batu		-	-
250	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Kurangnya sarana olahraga dan tempat yang terpisah sehingga harus adanya sarana olahraga terpadu di Desa : Proposal	-	Tanjung Batu		-	-

		Pengurugan Sarana Olahraga					
251	Penurapan Jalan (Beton/Pasangan Batu)	1. Belum terdapat Turap yang berfungsi sebagai penahan jalan dari abrasi. 2. Terjadi pengikisan tanah yang berkepanjangan sehingga merusak jalan utama.	-	Loa Raya		-	-
252	Peningkatan Jaringan Irigasi dibawah 1000 Ha	Rehab Total Waduk ini sangat perlu dilakukan karena sejalan dengan program pemerintah Desa Separi dalam pembangunan Cetak Sawah 100 hektare dalam rangka mempersiapkan Separi pada masa pasca tambang yang mana akan banyak warga yang kehilangan pekerjaan dan akan beralih menjadi petani karena lahan di separi masih banyak yang belum digarap, dan kedepannya sektor pertanian akan menopang perekonomian Desa Separi serta menjadi lumbung padi di wilayah Kukar, maka keberadaan waduk ini sangat penting	-	Separi		-	-

253	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Belum tersedianya drainase lingkungan yang memadai : Proposal Pembuatan Parit Jalan Idaman	-	Tanjung Batu		-	-
254	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Belum tersedianya drainase lingkungan yang memadai : Proposal Pembuatan Parit RT. 04	-	Tanjung Batu		-	-
255	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Belum tersedianya sarana & prasarana Desa yang memadai : Proposal Pembangunan Turap Badan Jalan Idaman	-	Tanjung Batu		-	-
256	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Lanjutan Parit RT.09 Masi sangat diperlukan guna menghatasi banjir di musim hujan	-	Buana Jaya		-	-
257	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Belum tersedianya Lapangan Sepak Bola yang memadai di Desa :Proposal Pembangunan Lapangan Sepak Bola	-	Tanjung Batu		-	-
258	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Tenggarong Seberang	Belum tersedianya Gedung Sekretariat Lembaga Desa : Proposal Pembangunan Gedung Sekretariat Lembaga Desa	-	Tanjung Batu		-	-
259	Penyediaan perlengkapan Jalan (LPJU)	Fasilitas Tiang Listrik LPJU yang ada belum dapat mengcover seluruh wilayah di Desa Loa Raya sehingga sangat membahayakan pengendara di malam hari.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Loa Raya		25	-

260	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Belum tersedianya saluran irigasi pembuangan yang memadai sebagai pencegah banjir : Proposal Pembangunan Gorong-Gorong Jalan Gerbang Raja	-	Tanjung Batu		-	-
261	Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR)	Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pencegahan kebakaran : Proposal Pelatihan Relawan Kebakaran/ Balakarcana	-	Tanjung Batu		-	-
262	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Peningkatan jaalan RT.03 masi sangat juh dari kata layak, jalan bergelombang, berlubang tekstur lempung dan licin jika terkena hujan	-	Buana Jaya		-	-
263	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Air sungai Separi Anak meluap ke Sungai Sidomakmur jika banjir dan menyababkan Sawah di Kelompok Tani Sumber Rejo tenggelam	-	Buana Jaya		-	-
264	Pembuatan Tempat Sampah Penampungan Sementara di Kecamatan Tenggarong Seberang	SAmpah menjadi masalah yang harus segera ditanggulangi	-	Buana Jaya		-	-
265	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Peningkatan Jalan RT 05 masih jauh dari kata layak, jalan bergelombang, berlubang dan tekstur lempung yang sangat licin saat hujan turun	-	Buana Jaya		-	-
266	Penurapan Jalan (Beton/Pasangan Batu)	Jalan yang sudah tidak layak dilalui mengganggu kenyamanan	-	Mulawarman		-	Lengkapi peta lokasi

		pengguna jalan					
267	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Parit drainase RT 17 masih belum mencukupi untuk musim hujan	-	Buana Jaya		-	-
268	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Tersumbatnya saluran air sehingga menggerus parit dan menyebabkan kelongsoran tanah	-	Mulawarman		-	-
269	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Tersumbatnya saluran air sehingga menyebabkan kelongsoran badan jalan	-	Mulawarman		-	-
270	Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir	Jika Hujan berlebih maka dipastikan saluran air meluap dan dapat menyebabkan banjir	-	Mulawarman		-	Lengkapi peta lokasi
271	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Saluran pembuangan air kurang lancar	-	Mulawarman		-	-
272	Pengadaan bibit Ternak Kambing	Belum tersedianya bibit kambing	-	Mulawarman		-	-
273	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Kurang layaknya atap rumah ibadah (Mushola) perlu adanya perbaikan	-	Mulawarman		-	-
274	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Belum tersedianya tempat/ ruang sebagai tempat penyimpanan peralatan rumah ibadah	-	Mulawarman		-	-
275	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Belum tersedianya ruang/ tempat untuk menyimpan peralatan rumah ibadah	-	Mulawarman		-	-

276	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Kurang memadainya jalan dilingkungan desa	-	Mulawarman		-	-
277	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Belum tersedianya jalan yang layak untuk para pengguna jalan melintasi	-	Mulawarman		-	-
278	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Belum tersedianya jalan yang layak	-	Mulawarman		-	-
279	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Belum terealisasinya jalan yang layak di desa	-	Mulawarman		-	-
280	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	menghambat aktifitas para petani/pekebun saat melakukan aktifitas bercocok tanam dikarenakan jalan yang tidak mendukung untuk dilewati	-	Mulawarman		-	usulan diarahkan ke Dinas Perkim, bukan ke Disbun karena terkait jalan lingkungan permukiman
281	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Belum memadainya jalan yang baik sebagai prasarana lalu lintas di lingkungan desa	-	Mulawarman		-	-
282	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan Tenggarong Seberang	Kurang memadainya fasilitas embung air di desa	-	Mulawarman		-	lengkapi usulan

283	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Air banjir dari Sungai Separi anak masuk ke area Persawahan Kelompok Tani Bhinnika jaya sehingga tidak bisa ditanami lebih dari 12 hektar sawah	-	Buana Jaya		-	-
284	Pelatihan Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	TSM adalah kawasan terdalam dari Bhuana jaya di RT 06 yang kondisinya paling memprihatinkan dibanding Dearah lain di Desa Induk Bhuana Jaya, perlu peningkatan pembangunan di daerah ini	-	Buana Jaya		-	-
285	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Tiga Posyandu di Desa Bhuana jaya belum memiliki saluran listrik sendiri untuk pelayan kesehatan anak dan masyarakat	-	Buana Jaya		-	-
286	Penyediaan Alat Kesenian	Kurangnya sarana & prasarana kesenian di Desa seperti Baju, Perlengkapan Tari & Alat musik Tradisional) : Proposal Penyediaan Alat Kesenian Tradisional	-	Tanjung Batu		-	-
287	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Peningkatan Jalan RT 18 masih jauh dari kata layak. Jalan yang masihh sempit	-	Buana Jaya		-	-
288	Pelatihan Kelompok Seni Tradisional (Sekolah/Masyarakat), Pemilihan Duta Budaya	Kurangnya Kecintaan Masyarakat terhadap kesenian Lokal) : Proposal Pelatihan Kelompok Seni Tari	-	Tanjung Batu		-	-

		Tradisional kelompok Putri Tanjung					
289	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Bhuana Jaya belum memiliki lapangan sepakbola yang memadai	-	Buana Jaya		-	-
290	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Ketimpangan Informasi mengenai Desa Bhuana Jaya harus mendapatkan prioritas	-	Buana Jaya		-	-
291	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Peningkatan Jalan 200 M RT.15 masih sangat jauh dari kata layak, Jalan bergelombang, berlubang dan tekstur lempung yang sangat licin saat turun hujan	-	Buana Jaya		-	-
292	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Jalan Usaha Tani menuju Kelompok Tani Sangkuriang Sakti B rusak parah. licin bergelombang dan menanjak	-	Buana Jaya		-	-
293	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Peningkatan jalan 200 M RT.15 masih sangat jauh dari kata layak, jalan bergelombang, berlubang dan tekstur lempung yang sangat licin jika turun hujan	-	Buana Jaya		-	-
294	Penurapan Jalan (Beton/Pasangan Batu)	1. Belum terdapat Turap sebagai penahan jalan dari abrasi. 2. Terjadi pengikisan tanah yang berkepanjangan sehingga	-	Loa Raya		-	-

		merusak jalan utama.					
295	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	1. Kondisi gorong-gorong saat ini terjadi penyumbatan dikarenakan longsoran tanah dari sekitar jalan dan bila musim hujan, aliran airnya akan tersumbat. 2. Terjadi pengikisan tanah yang berkepanjangan.	-	Loa Raya		-	lengkapi usulan
296	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Lanjutan Normalisasi Parit Pertanian (Meningkatkan kapasitas parit pertanian)	-	Bangun Rejo		-	-
297	Rehabilitasi Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Kondisi Bangunan saat ini rusak serta berlubang sehingga ketika musim hujan membuat balai tidak nyaman untuk digunakan karena terjadi kebocoran.	-	Loa Raya		-	-
298	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Normalisasi Parit Alam (Meningkatkan kapasitas parit alam)	-	Bangun Rejo		-	-
299	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Peningkatan Gedung Kantor Desa (Minimnya ruangan untuk melakukan kegiatan operasional Pemerintah Desa)	-	Bangun Rejo		-	-
300	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Kondisi Masjid saat ini masih belum mampu menampung seluruh jemaah seperti	-	Loa Raya		-	-

		saat kegiatan memperingati hari besar Islam.					
301	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Pembangunan Pagar Beton Area Kantor Pemerintah Desa (Belum adanya pagar yang layak untuk pengamanan di area Kantor Pemerintah Desa	-	Bangun Rejo		-	-
302	Pembangunan Embung Perkebunan	Kondisi embung saat ini belum tersedia.	-	Loa Raya		-	-
303	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Pembangunan DAM (Pembagi Air) RT. 14 (sebagai wadah pengendali banjir)	-	Bangun Rejo		-	-
304	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Lanjutan Semenisasi Jalan DAM RT. 14 (Akses jalan kurang memadai)	-	Bangun Rejo		-	-
305	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Lanjutan Semenisasi Jalan dari RT. 18 s/d RT. 29 (Akses jalan kurang memadai)	-	Bangun Rejo		-	-
306	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Lanjutan Semenisasi Jalan Muhsan Makbul RT. 19 (akses jalan kurang memadai)	-	Bangun Rejo		-	-
307	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Semenisasi Jalan TPU Blok C (akses jalan kurang memadai)	-	Bangun Rejo		-	-
308	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Semenisasi Jalan RT. 27 Gang SDI (akses jalan kurang memadai)	-	Bangun Rejo		-	-

309	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Lanjutan Semenisasi Parit Jalan Kademba RT.10 (Memperlancar saluran air untuk mencegah terjadinya banjir)	-	Bangun Rejo		-	Lengkapi peta lokasi, proposal, dan foto lokasi
310	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	belum adanya penurapan di sekitar jalan persawahan	-	Bukit Pariaman		-	-
311	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Belum Adanya Penurapan di Sekitar Jalan Persawahan	-	Bukit Pariaman		-	-
312	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Belum Adanya Penurapan di Sekitar Jalan Persawahan	-	Bukit Pariaman		-	-
313	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Belum Adanya Penurapan di Sekitar Jalan Persawahan	-	Bukit Pariaman		-	-
314	Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR)	Kurang Pemahaman Mengenai Upaya Pencegahan Kebakaran	-	Bukit Pariaman		-	-
315	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Pengurugan Tanah di komplek Kantor Desa Loa Lepu Untuk Pembangunan BPU	-	Loa Lepu		-	-
316	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Belum Adanya jalan sebagai akses untuk sarana transportasi di lingkungan warga	-	Loa Lepu		-	-
317	Penyediaan perlengkapan Jalan (LPJU)	Belum adanya penerangan jalan dikawasan	-	Loa Lepu		-	-

		tersebut, sehingga kurang adanya rasa aman dimasyarakat pada saat malam hari.					
318	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Belum adanya akses jalan yang memadai dilingkungan warga setempet, sehingga menghambat kegiatan sehari-hari	-	Loa Lepu		-	-
319	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	kurang memadainya bangunan untuk proses mengajar sehingga perlu mengajukan proposal Rehab Berat Gedung Lokal Pendidikan Anak Usia Dini..(PAUD)	-	Tanjung Batu		-	-
320	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Belum Adanya Penurapan di Sekitar Jalan Persawahan yang Mengakibatkan Tanah Mudah Longsor	-	Bukit Pariaman		-	-
321	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Belum Adanya Penurapan di Sekitar Jalan Persawahan yang Mengakibatkan Tanah Mudah Longsor	-	Bukit Pariaman		-	-
322	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Belum adanya rumah ibadah yang layak untuk dipergunakan untuk beribadah	-	Mulawarman		-	-
323	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Belum adanya Drainase di Sekitar Persawahan	-	Bukit Pariaman		-	-
324	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan Tenggarong Seberang	Belum terealisasinya pemasangan Jaringan pipa air bersih di setiap wilayah RT	-	Mulawarman		-	-

325	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Pick Up)	Tidak Tersedia Sarana Pengangkutan Sampah	-	Bukit Pariaman		-	-
326	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Jalan yang tidak layak untuk dilewati pengguna jalan dikarenakan terdapat lubang-lubang di sepanjang jalan	-	Mulawarman		-	-
327	Penyediaan Benih Ikan / Udang	Tidak Tersedianya Benih Ikan	-	Bukit Pariaman		-	-
328	Penyediaan Pakan Ikan	Tidak Tersedianya Pakan Ikan	-	Bukit Pariaman		-	-
329	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Belum memadainya jalan di lingkungan RT	-	Mulawarman		-	-
330	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Kurangnya keamanan bagi pengguna jalan saat melewati karena jembatan sudah rusak	-	Mulawarman		-	-
331	Peningkatan,Rekonstruksi jalan dan penanganan longsoran Kabupaten yang Menghubungkan Desa ke Ibukota Kecamatan	Badan Jalan belum sepunuhnya disemenisasi, sehingga menghabat akses warga untuk mencapai kecematan/kabupaten kota	-	Loa Lepu		-	-
332	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Belum tersedianya jalan yang baik bagi pengguna jalan di lingkungan RT	-	Mulawarman		-	-
333	Peningkatan,Rekonstruksi jalan dan penanganan longsoran Kabupaten yang Menghubungkan Desa ke Ibukota Kecamatan	Badan Jalan yang ada belum sepunuhnya tersemenisasi, sehingga menghambat akses warga desa untuk mencapai	-	Loa Lepu		-	-

		kecamatan/kabupaten kota					
334	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Sungai Separi Anak (Lampiri) air melimpas kembali ke sungai Sidomakmur, Kelompok tani Sumber Rejo terendam. memerlukan pintu air otomatis	-	Buana Jaya		-	-
335	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Belum adanya badan jalan, sehingga wilayah tersebut sulit untuk diakses	-	Loa Lepu		-	-
336	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Belum adanya jalan untuk mengakses wilayah sekitar jalan sehingga dibutuhkan semenisasi jalan	-	Loa Lepu		-	-
337	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Belum adanya akses jalan yang memadai di lingkungan setempat	-	Loa Lepu		-	-
338	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Belum adanya jalan untuk mengakses wilayah sekitar jalan sehingga dibutuhkan pembangunan badan jalan	-	Loa Lepu		-	-
339	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Longsornya badan jalan akibat pengikisan karena debit hujan tinggi	-	Mulawarman		-	-
340	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	terkikisnya badan jalan dikarenakan debit hujan tinggi	-	Mulawarman		-	-

3 4 1	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Tersumbatnya saluran air jika hujan	-	Mulawarman		-	-
3 4 2	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Akses jalan yang ada mengalami kerusakan akibat sering terendam saat banjir, sehingga menggangu kenyaman saat dilewati	-	Loa Lepu		-	Perbaiki alamat yg benar sesuai lokasi kegiatan
3 4 3	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Semenisasi Jalan Usaha Tani Entapi keberadaannya sangat penting bagi para petani dan pekebun yang merupakan akses utama yang terdekat dengan letak sawah dan perkebunan mereka, kondisinya saat ini masih berupa jalan urug yang apabila hujan akan berlumpur sehingga menganggu aktivitas para petani ketika melintasi jalan tersebut, banyak usulan dari para petani agar jalan itu di perbaiki agar nyaman di lintasi walau ketika hujan sekalipun.	-	Separi		-	-
3 4 4	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Belum adanya tempat pertemuan di wilayah tersebut	-	Loa Lepu		-	-

345	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Jalan masih berupa tanah apabila hujan kondisi jalan licin dan sulit untuk dilewati	-	Loa Lepu		-	-
346	Penyediaan Unit Keramba	Tersedianya lahan/lokasi yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya ikan air tawar tersebut namun terdapat kendala dalam pengembangan usaha tersebut berupa modal	-	Loa Raya		-	-
347	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Turap Ulin penahan abrasi sungai Mahakam di RT.010 Desa Loa Ulung kondisinya sudah sangat rusak dan rawan terjadi longsor (Pembangunan Turap Ulin Sungai Mahakam RT.010)	-	Loa Ulung		-	-
348	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Jalan RT 06 TSM-LPHD sangat tidak memadai	-	Buana Jaya		-	-
349	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	jalan masih berupa tanah, apabila terjadi hujan jalan licin dan becek	-	Loa Lepu		-	-
350	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	jalan masih berupa tanah dan apabila hujan sulit dilalui	-	Loa Lepu		-	-
351	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan (Perkotaan)	Belum adanya drainase/ paret untuk tempat pembuang air	-	Loa Lepu		-	-

352	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong Seberang	belum tersedia semenisasi jalan yang baik (Semeninasi Jalan Pongtiku)	-	Loa Ulung		-	Lengkapi Foto Lokasi dan Peta Lokasi
353	Pembangunan dan Perbaikan MCK Umum/Komunal Kecamatan Tenggarong Seberang	Wilayah pertanian dan kehutanan Dusun Pulau Mas merupakan area yang sering digunakan untuk kegiatan pemerintah tetapi selalu kesulitan ketika ingin buang air	-	Buana Jaya		-	-
354	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	halaman gereja masih tanah dan berlumbur jika hujan (Peningkatan Halaman Gereja GPIB Hosana Loa Ulung	-	Loa Ulung		-	-
355	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	jalan di daerah tersebut masih berupa latrit	-	Loa Lepu		-	-
356	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Belum ada badan jalan	-	Loa Lepu		-	-
357	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Jalan yang diajukan sudah ada badan jalan, masih perlu untuk disemenisasi agar mudah dilewati	-	Loa Lepu		-	-
358	Fasilitasi sarana prasarana desa	1. Belum tersedianya halaman Kantor Desa Loa Raya yang memadai. 2. Saat ini kondisi halaman masih berupa	-	Loa Raya		-	-

		tanah datar dan dipenuhi oleh tanaman liar.					
359	Fasilitasi sarana prasarana desa	1. Belum tersedianya halaman Kantor Desa Loa Raya yang memadai. 2. Saat ini kondisi halaman masih berupa tanah datar dan dipenuhi oleh tanaman liar.	-	Loa Raya		-	-
360	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Jalan didaerah tersebut menjadi licin dan becek apabila terjadi hujan	-	Loa Lepu		-	-
361	Fasilitasi sarana prasarana desa	Saat ini belum tersedianya pagar dikawasan Kantor Desa Loa Raya sehingga tidak adanya pembatas untuk kawasan tersebut.	-	Loa Raya		-	-
362	Pekerjaan Sederhana tidak menambah Aset (Pembersihan Rumput/semak belukar/gulma,sedimentasi lumpur) Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Sedimentasi saluran pengairan dan pertumbuhan gulma air di Dusun Sidomakmur wilayah P3A Tirta Tani Makmur terjadi sangat cepat	-	Buana Jaya		-	-
363	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Jalan kabupaten di RT 11 mengalami kerusakan parah	-	Buana Jaya		-	-
364	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Jalan Kabupaten yang berada di RT 18 Dusun Sidomakmur rusak parah	-	Buana Jaya		-	-

365	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Jalan menuju PS KTH Tuah Himba sangat tidak memadai, bergelombang dan licin	-	Buana Jaya		-	-
366	Pembangunan TPS3R dan sarana pendukungnya	Sampah menjadi masalah yang harus segera mendapatkan solusi	-	Buana Jaya		-	-
367	Penyediaan perlengkapan Jalan (LPJU)	Jalan di Desa Bhuana Jaya masih banyak yang belum memiliki penerangan sehingga membahayakan keselamatan dan keamanan pengguna jalan	-	Buana Jaya		-	-
368	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Pembangunan Jembatan RT. 17 (I) (Akses jalan kurang memadai)	-	Bangun Rejo		-	-
369	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Saluran drainase Kelompok Tani Sidomakmur mengalami sedimentasi dan gulma air akibat banjir	-	Buana Jaya		-	-
370	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Semenisasi Jalan RT. 17 (akses jalan kurang memadai)	-	Bangun Rejo		-	-
371	Rehabilitasi Jalan Menuju Akses Pendidikan,Kesehatan, Wisata dan Jalan Produksi Kabupaten	Pembangunan Alun-alun Desa (Meningkatan pembangunan ekonomi berbasis pariwisata)	-	Bangun Rejo		-	-
372	Rehabilitasi Jalan Menuju Akses Pendidikan,Kesehatan, Wisata dan Jalan Produksi Kabupaten	Pengembangan Destinasi Wisata Bukit Mahoni (Meningkatan pembangunan ekonomi berbasis pariwisata)	-	Bangun Rejo		-	-

373	Rehabilitasi Jalan Menuju Akses Pendidikan,Kesehatan, Wisata dan Jalan Produksi Kabupaten	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Meningkatan pembangunan ekonomi berbasis pariwisata)	-	Bangun Rejo		-	-
374	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Mesin Pompa, Selang, Nozle, Conection, baju tahan panas, sepatu, helm) (Karhutla)	Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran (Belum adanya sarana pemadam kebakaran di desa)	-	Bangun Rejo		-	-
375	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Pembangunan Pagar Lapangan Volly (Belum adanya pagar yang layak untuk pengamanan di area lapangan)	-	Bangun Rejo		-	-
376	Penggantian Jembatan Kecamatan Panjang > 6 Meter Struktur Beton	Jembatan Rusak dan Rawan dilalui kendaraan besar seperti truk dan yang lainnya	-	Perjiwa		-	-
377	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong	kondisi jalan saat ini jalan rusak	-	Perjiwa		-	-
378	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong Seberang	kondisi saat ini belum ada semenisasi jalan	-	Perjiwa		-	-
379	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Semenisasi Jalan Trunojoyo RT 004 Desa Bukit Raya (Kondisi Jalan Rusak dan Susah Dilalui Saat Musim Hujan)	-	Bukit Raya		-	-

380	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Semenisasi Parit lingkungan RT 001 Desa Bukit Raya (Kondisi Parit sangat memprihatinkan Sehingga Aliran Air Kurang Maksimal dan ketika musim hujan air meluber ke perumahan)	-	Bukit Raya		-	-
381	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Semenisasi Parit Lingkungan RT 003 Desa Bukit Raya (Kondisi Parit Memprihatinkan Sehingga Aliran Air Kurang Maksimal, Terutama Ketika Musim Hujan Air Meluber Keperumahan)	-	Bukit Raya		-	-
382	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Sangkuriang Sakti A belum memadai, licin saat hujan	-	Buana Jaya		-	-
383	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Semenisasi Parit Lingkungan RT 004 Desa Bukit Raya (Kondisi Parit sangat memprihatinkan sehingga aliran air kurang maksimal, Terutama saat hujan air meluber hingga keperumahan)	-	Bukit Raya		-	-
384	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Semenisasi Parit Lingkungan RT 005 Desa Bukit Raya (Kondisi Parit Sangat Memprihatinkan Sehingga Aliran Air Kurang Maksimal, Terutama saat hujan air	-	Bukit Raya		-	-

		meluber keperumahan)					
385	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (photografi, film, musik)	Sumber daya manusia dalam pengembangan wisata Pokdarwis Bhuana jaya AgroEkowisata belum memadai terutam bidang fotografi dan pemasaran	-	Buana Jaya		-	-
386	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Semenisasi Parit Lingkungan RT 016 Desa Bukit Raya (Kondisi Parit sangat Memprihatikan Sehingga Aliran Air Kurang Maksimal, Terutama Saat Hujan Air Meluber Keperumahan)	-	Bukit Raya		-	-
387	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Semenisasi Parit Lingkungan RT 017 Desa Bukit Raya (Kondisi Parit Sangat Memprihatinkan sehingga aliran air kurang maksimal, Terutama saat hujan air meluber keperumahan)	-	Bukit Raya		-	-
388	Pelatihan Anggota Organisasi Kepemudaan dalam berwirausaha	Pokdarwis Bhuana Jaya AgroEkowisata masih awam dalam pengelolaan wisata desa	-	Buana Jaya		-	-
389	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Semenisasi Parit RT 003 Desa Bukit Raya (Kondisi Parit Sangat Memprihatinkan Sehingga Aliran Air Kurang Maksimal,	-	Bukit Raya		-	-

		Terutama Saat Hujan Air Meluber Keperumahan)					
390	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Semenisasi Parit RT 005 Desa Bukit Raya (Kondisi Parit Sangat Memprihatinkan Sehingga Aliran Air kurang Maksimal, Terutama Saat Hujan Air Meluber Keperumahan)	-	Bukit Raya		-	-
391	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Semenisasi Parit RT 017 Desa Bukit Raya (Kondisi Parit Sangat Memprihatinkan Sehingga Aliran Air Kurang Maksimal, Terutama Saat Hujan Air Meluber Keperumahan)	-	Bukit Raya		-	-
392	Pengadaan Tower Repaeter / Penguat Sinyal	Di Kawasan Wisata Blackstone geopark signal internet sangat lemah dan mempengaruhi kunjungan	-	Buana Jaya		-	-
393	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Penimbunan Jalan Gang Sukri RT 001 Desa Bukit Raya (Kondisi Jalan Sangat Memprihatinkan Sehingga Mengganggu Aktifitas Apalagi saat Musim Hujan)	-	Bukit Raya		-	-
394	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Penimbunan Jalan Usaha Tani RT 016 Desa Bukit Raya (Kondisi Jalan Sangat Memprihatinkan Sehingga Menggangu Aktifitas Warga Apalagi Saat Hujan)	-	Bukit Raya		-	-
395	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Puskesmas Pembantu di Desa Bhuana	-	Buana Jaya		-	-

		jaya, kondisinya tidak bagus dan tidak memadai					
396	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Penimbunan Jalan Usaha Tani RT 017 Desa Bukit Raya (Kondisi Jalan Sangat Memprihatinkan Sehingga Mengganggu Aktifitas Warga Apalagi Saat Hujan)	-	Bukit Raya		-	-
397	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Pembuatan Jalan Usaha Tani Kelompok Dewi Shinta Desa Bukit Raya (Kondisi Jalan sangat Memprihatikan Apalagi saat hujan Sehingga menghambat Aktifitas Dibidang Pertanian)	-	Bukit Raya		-	-
398	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Pelebaran Jalan Usaha Tani 1 dan 2 RT 017 Desa Bukit Raya (Kondisi Jalan Yang Memprihatinkan Sehingga Menggaggu Aktifitas Warga)	-	Bukit Raya		-	-
399	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Pembangunan Masjid Al Muhajirin Dusun Pulau Mas terhambat kurangnya dana	-	Buana Jaya		-	-
400	Penyediaan Alat Kesenian	Belum adanya terop dan kursi di organisasi tersebut	-	Buana Jaya		-	-
401	Fasilitasi sarana prasarana desa	Di Desa Loa Raya saat ini belum ada pembangunan gapura yang dapat menjadi informasi sebagai batas wilayah desa Loa Raya.	-	Loa Raya		-	-
402	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	tidak adanya drainase/parit jalan membuat genangan air yang terjadi	-	Manunggal Jaya		-	Lengkapi Peta Lokasi

		pada saat musim hujan yang dapat membuat jalan yang sudah di beton terkikis dan menjadi rusak					
403	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	1. Kondisi gorong-gorong saat ini terjadi penyumbatan dikarenakan longsoran tanah dari sekitar jalan dan bila musim hujan, aliran airnya akan tersumbat. 2. Terjadi pengikisan tanah yang berkepanjangan.	-	Loa Raya		-	-
404	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Tidak ada saluran drainase atau parit jalan lingkungan membuat jalan tergenang terlebih pada saat musim hujan. Oleh karena itu perlu dilakukan pembangunan drainase jalan lingkungan agar tidak merusak jalan beton yang sudah ada	-	Manunggal Jaya		-	Data lengkap dan dapat diproses
405	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Pembuatan Badan Jalan Menuju Area Perladangan RT 003 Desa Bukit Raya (Perlunya Badan Jalan Untuk Menunjang Perekonomian Warga)	-	Bukit Raya		-	-
406	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Pembuatan Gorong-gorong Jalan Trunojoyo RT 004 Desa Bukit Raya (Kurang Lebarnya Parit Sehingga Air Meluber Keperumahan)	-	Bukit Raya		-	-

407	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Pembuatan Jalan Usaha Tani RT 016 Desa Bukit Raya (Belum Adanya Jalan Menuju Persawahan Di RT 016)	-	Bukit Raya		-	-
408	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Pembuatan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Makmur (Jalur 1) Desa Bukit Raya (Belum Adanya Akses Jalan Menuju Kepersawahan)	-	Bukit Raya		-	-
409	Peningkatan Jaringan Irigasi dibawah 1000 Ha	Kondisi saluran irigasi saat ini terjadi pendangkalan di karenakan longsoran tanah dari sekitar jalan dan bila musim hujan, aliran airnya akan tersumbat	-	Loa Raya		-	-
410	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Pembuatan Parit Lingkungan RT 016 Desa Bukit Raya (Belum Adanya Parit Di RT 016 Sehingga Saat Musim Hujan Air Meluber Keperumahan)	-	Bukit Raya		-	-
411	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Pembuatan Parit Lingkungan RT 004 Desa Bukit Raya (Belum Adanya Parit Di RT 004 Desa Bukit Raya)	-	Bukit Raya		-	-
412	Penyediaan Alat Kesenian	Pengadaan Perlengkapan Kesenian Gamelan (Belum tersedianya sarana kesenian)	-	Bangun Rejo		-	lengkapi peta lokasi

4 1 3	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Pembuatan Gorong-gorong Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Indah RT 003 Desa Bukit Raya (Kurangnya Saluran Gorong-gorong Di Persawahan Sehingga sering Terjadi Banjir)	-	Bukit Raya		-	-
4 1 4	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Semenisasi Jembatan jerembab Rt.8 sangat di nantikan oleh warga yang bernukim di Rt.8 terutama yang bermukim di area jembatan tersebut, karena lokasinya diatas rawa-rawa yang selalu tergenang air maka keberadaan jembata ini sangat di perlukan dan semenisasi ini juga sebagai upaya mengurangi kebisingan saat di lintasi kendaaran bermotor, karena jembatan ini salah satu jalan pintas warga ketika akan ke jalan depan begitupun sebaliknya	-	Separi		-	-
4 1 5	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Jalan yang ada masih berupa laterit, apabila turun hujan kondisi jalan menjadi licin dan menghambat akses warga yang lewat	-	Loa Lepu		-	Sinkronkan alamat proposal dan alamat di usulan kegiatan
4 1 6	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Belum tersedianya rumah yang layak huni bagi penjaga masjid di desa loa raya.	-	Loa Raya		-	-

417	Pelatihan Tenaga kerja konstruksi	Pelatihan Penyusunan RAB Konstruksi dan Desain Teknis (Meningkatkan kapasitas tim perencanaan desa)	-	Bangun Rejo		-	-
418	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Pembuatan Gorong-gorong Jalan Usaha Tani RT 017 (Belum Adanya Gorong-gorong Di Persawahan Sehingga Sering Terjadi Banjir Saat Hujan)	-	Bukit Raya		-	-
419	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Semenisasi Jalan Usaha Tani Entapi keberadaannya sangat penting bagi para petani dan pekebun yang merupakan akses utama yang terdekat dengan letak sawah dan perkebunan mereka, kondisinya saat ini masih berupa jalan urug yang apabila hujan akan berlumpur sehingga menganggu aktivitas para petani ketika melintasi jalan tersebut, banyak usulan dari para petani agar jalan itu di perbaiki agar nyaman di lintasi walau ketika hujan sekalipun	-	Separi		-	1428620 16-02-2024 Sugianto, SH Semenisasi Jalan Usaha Tani Entapi keberadaannya sangat penting bagi para petani dan pekebun yang merupakan akses utama yang terdekat dengan letak sawah dan perkebunan mereka, kondisinya saat ini masih berupa jalan urug yang apabila hujan akan berlumpur sehingga menganggu aktivitas para petani ketika melintasi jalan tersebut, banyak usulan dari para petani agar jalan itu di perbaiki agar nyaman di lintasi walau ketika hujan sekalipun Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Desa Separi, Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Separi Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan usulan untuk jalan usaha tani diarahkan ke Dinas Pertanian dan Peternakan, untuk Dinas Perkebunan untuk Jalan Produksi, apabila terkait dengan jalan Lingkungan diarahkan pada

							Dinas Perumahan dan Permukiman
420	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Pengerasan Jalan Usaha Tani RT 001 Desa Bukit Raya (Kondisi Jalan Rusak dan Susah Dilalui Saat Musim Hujan)	-	Bukit Raya		-	-
421	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Posyandu Cempaka belum memiliki Gedung Sendiri	-	Buana Jaya		-	-
422	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Normalisasi Parit RT 005 Desa Bukit Raya (Kondisi Parit Yang Sudah Dangkal Sehingga Perlunya Normalisasi)	-	Bukit Raya		-	-
423	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Bangunan Gedung Posyandu yang ada saat ini kurang memadai, sehingga tidak memberikan kenyaman	-	Loa Lepu		-	-

		pada saat kegiatan					
424	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Pembuatan Parit Jalan RT 005 Desa Bukit Raya (Belum Adanya Parit Jalan Di RT 005)	-	Bukit Raya		-	-
425	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Saluran Pembuangan Air Kurang Lancar	-	Mulawarman		-	-
426	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Belum adanya jalan jalan untuk mengakses wilayah sekitar jalan sehingga dibutuhkan pengurukan karena bakal jalan terletak di wilayah rawa yang tidak bisa dilewati sama sekali	-	Loa Lepu		-	-
427	Fasilitasi sarana prasarana desa	Pengadaan Seragam Perangkat Desa, Staf dan BPD (Meningkatkan kinerja pemerintah desa dan BPD)	-	Bangun Rejo		-	-
428	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Operasional Sekretariat Posyandu Remaja Serasi Desa Bangun Rejo (Belum tersedianya sarana prasarana posyandu remaja)	-	Bangun Rejo		-	-
429	Penurapan Jalan (Beton/Pasangan Batu)	sudah ada badan jalan namun terjadi longsor terkikis air hujan	-	Loa Lepu		-	-

430	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong	Jalan belum sepenuhnya semenisasi sehingga masyarakat sulit mengaksesnya	-	Loa Lepu		-	Perbaiki SKPD tujuan awal
431	Pembangunan Embung Perkebunan	Pemanfaatan Embung Desa Bukit Raya (Kurangnya Pengairan Persawahan Sehingga Perlunya Pengairan Dari Embung Yang Ada)	-	Bukit Raya		-	-
432	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Pembangunan Pasar Desa Bukit Raya (Kondisi Pasar Yang Sudah Rusak Sehingga Perlunya Pembangunan Ulang)	-	Bukit Raya		-	-
433	Penurapan Jalan (Beton/Pasangan Batu)	sudah ada badan jalan namun terjadi longsor terkikis air hujan	-	Loa Lepu		-	-
434	Fasilitasi Pertemuan lembaga/komunitas seni (Seminar/Worksh op)	Pengurugan Lahan Lokasi Rumah Adat Goa Batu Gelap ini dalam upaya memulai pembangunan rumah adat bagi warga Desa Separi terutama bagi pelaku kesenian selain sebagai tempat pertemuan juga sebagi tempat latihan bagi kelompok tari Goa Batu Gelap dan pelaku seni lainnya dalam meleestarikan bjudaya dan adat istiadat Separi, karena selama ini kegiatan latihan menari dll masih menumpang di halaman SMP	-	Separi		-	-

		Separi yang mana kurang layak karena terlalu mepet dengan jalan raya					
435	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Pembangunan Gapura Selamat Datang Desa Bukit Raya (Belum Adanya Gapura Selamat Datang Didesa Bukit Raya)	-	Bukit Raya		-	-
436	Fasilitasi Pertemuan lembaga/komunitas seni (Seminar/Worksh op)	Pengurugan Lahan Lokasi Panggung Adat Goa Batu Gelap ini dalam upaya memulai pembangunan panggung adat bagi warga Desa Separi terutama bagi pelaku kesenian selain sebagai tempat pertunjukan atau tempat tampil bagi kelompok tari Goa Batu Gelap dan pelaku seni lainnya dalam meleestarikan bjudaya dan adat istiadat Separi, karena selama ini kegiatan latihan menari dll masih menumpang di halaman SMP Separi yang mana kurang layak karena terlalu mepet dengan jalan raya	-	Separi		-	-
437	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Tidak Tersedianya Sarana Rumah Ibadah : Proposal Pembangunan Rumah Ibadah	-	Tanjung Batu		-	-

		Diperbatasan Desa Tj.Batu,Manunggal Jaya,Bangun Rejo					
438	Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) di Kecamatan Tenggarong Seberang	Kurangnya Ruang Pembelajaran Siswa/Siswi TPA	-	Mulawarman		-	-
439	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Sudah ada badan jalan dan juga turap kanan kiri jalan, jika turun hujan masih licin dan berlumpur	-	Loa Lepu		-	-
440	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Pelatihan Kader Posyandu Balita dan Lansia (Meningkatkan kinerja kader posyandu balita dan lansia)	-	Bangun Rejo		-	-
441	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	tidak adanya turap sungai di wilayah rt 5 di khawatirkan membuat badan sungai terkikis pada saat musim penghujan datang. oleh sebab itu di perlukan pembangunan turap sungai	-	Manunggal Jaya		-	-
442	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	tidak ada turap sungai di walayah rt 9 di khawatirkan dapat membuat sungai terkikis di musim hujan. oleh sebab itu perlu di lakukan pembangunan turap sungai di rt 9	-	Manunggal Jaya		-	-
443	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	tidak adanya turap sungai di wilayah rt 19 membuat badan sungai mudah terkikis saat memasuki musim hujan. oleh karena itu perlu dilakukan	-	Manunggal Jaya		-	-

		pembangunan turap sungai					
444	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	tidak ada turap sungai di RT 6/sebelah utara kantor BPP. membuat badan sungai mudah terkikis. perlu di lakukan pembangunan turap sungai.	-	Manunggal Jaya		-	-
445	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Kurang Lancarnya saluran Air	-	Mulawarman		-	-
446	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	tidak adanya turap sungai sungai di rt 20 di khawatirkan membuat badan sungai terkikis pada saat musim hujan. perlu di lakukan pembangunan turap sungai di lingkungan rt 20.	-	Manunggal Jaya		-	-
447	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Pembuatan Parit Jalan Melati RT 014 Desa Bukit Raya (Belum Adanya Parit Di RT 014 Sehingga Perlu Dibuatnya Parit untuk Memperlancar Pengaliran Pembuangan)	-	Bukit Raya		-	-
448	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	tidak ada drainase/parit lingkungan membuat jalan mudah tergenang air pada saat musim hujan. perlu di lakukan pembangunan parit lingkungan	-	Manunggal Jaya		-	Lengkapi dengan titik Peta Lokasi

		agar jalan yang sudah di semenisasi tidak rusak					
449	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	tidak ada drainase membuat jalan tegenang air pada saat hujan. perlu di lakukan pembangunan drainase agar jalan tidak rusak	-	Manunggal Jaya		-	Lengkapi dengan titik Peta Lokasi
450	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Pembuatan Gorong-gorong Jalan Usaha Tani RT 015 Desa Bukit Raya (Kurang Lancarnya Pengairan Diparit Persawahan Sehingga Diperlukannya Pembuatan Gorong-gorong)	-	Bukit Raya		-	-
451	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Peralatan Kesehatan Posyandu Remaja Serasi Desa Bangun Rejo (Minimnya peralatan operasional kegiatan posyandu remaja)	-	Bangun Rejo		-	-
452	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	kurang nyaman saat di pergunakan untuk beribadah karena retak dan rapuh rumah ibadah perlu diperbaiki	-	Mulawarman		-	-
453	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	perlu di lakukan pembanguna drainase di lingkungan rt 9 karena dapat mengikis badan jalan	-	Manunggal Jaya		-	Lengkapi dengan titik Peta Lokasi
454	Penyediaan perlengkapan Jalan (LPJU)	Pemasangan Tiang Listrik Jalan Latsitarda II RT. 01, RT. 02, RT. 18 dan 31	-	Bangun Rejo		-	-
455	Penyediaan perlengkapan Jalan (LPJU)	Pengadaan Lampu Penerangan	-	Bangun Rejo		-	-

		Jalan Tenaga Surya					
456	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (photografi, film, musik)	Pelatihan Pemetaan Foto Udara (Drone) (Meningkatkan kapasitas dalam memetakan wilayah)	-	Bangun Rejo		-	-
457	Rehabilitasi Jalan Menuju Akses Pendidikan,Kesehatan, Wisata dan Jalan Produksi Kabupaten	Penyuluhan Tentang Tata Guna Lahan Ex. Tambang	-	Bangun Rejo		-	-
458	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (photografi, film, musik)	Pengembangan Sistem Informasi Desa	-	Bangun Rejo		-	-
459	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	tidak adanya drainase di rt 12 membuat jalan mudah rusak karena tergenang air pada saat hujan. oleh karena itu perlu di lakukan pembangunan saluran drainase di rt 12	-	Manunggal Jaya		-	Lengkapi dengan titik Peta Lokasi
460	Pencacah Sampah Organik	Sosialisasi Pengembangan Bisnis Sampah Organik dan Non Organik	-	Bangun Rejo		-	Lengkapi peta lokasi
461	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	perlu di lakukan pembangunan drainase di lingkungan rt 19 agar jalan yang tergenang air pada saat hujan tidak merusak jalan yang ada	-	Manunggal Jaya		-	Lengkapi Peta Lokasi
462	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	tidak ada turap di lingkungan rt 6 membuat badan sungai terkikis ketika banjir di musim hujan. oleh karena itu perlu dilakukan pembangunan	-	Manunggal Jaya		-	-

		turap sungai di rt 6					
463	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	tidak ada turap sungai membuat badan sungai mudah terkikis. oleh sebab itu perlu di lakukan pembangunan turap sungai di lingkungan rt 19	-	Manunggal Jaya		-	-
464	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	karena kebakar	-	Buana Jaya		-	-
465	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	PEMBANGUNAN BELUM SELESAI	-	Buana Jaya		-	-
466	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Belum ada Parit Sehingga sering banjir jika huja deras	-	Buana Jaya		-	-
467	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Prestasi	Belum tersedianya sarana dan prasarana olahraga sepak bola yang memadai (Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Sepakbola)	-	Loa Ulung		-	-
468	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Belum tersedianya jalan alternative yang baik (Peningkatan Jalan Masfy Husaini)	-	Loa Ulung		-	-

469	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Pembuatan Gorong-gorong Jalan Usaha Tani RT 013 Desa Bukit Raya (Kurang Lancarnya Pengaliran Diparit Sehingga Diperlukannya Pembuatan Gorong-gorong)	-	Bukit Raya		-	-
470	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Peningkatan Jalan Usaha Tani RT 010 Desa Bukit Raya (Kondisi Jalan Rusak dan Susah Dilalui Saat Hujan)	-	Bukit Raya		-	-
471	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Peningkatan Jalan Usaha Tani RT 011 Desa Bukit Raya (Kondisi Jalan Yang Rusak dan Susah Dilalui Saat Hujan)	-	Bukit Raya		-	-
472	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Peningkatan Jalan Usaha Tani RT 013 Desa Bukit Raya (Kondisi Jalan Rusak Dan Susah Dilalui Saat Hujan)	-	Bukit Raya		-	-
473	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Peningkatan Jalan Usaha Tani RT 014 Desa Bukit Raya (Kondisi Jalan Rusak dan Susah Dilalui Saat Hujan)	-	Bukit Raya		-	-
474	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Peningkatan Jalan Usaha Tani RT 015 Desa Bukit Raya (Kondisi Jalan Rusak dan Susah Dilalui Saat Hujan)	-	Bukit Raya		-	-
475	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Normalisasi Parit Skunder Desa Bukit Raya (Kondisi Parit Skunder Sudah Dangkal Sehingga Perlunya Normalisasi)	-	Bukit Raya		-	-

476	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Lanjutan Pembuatan Semenisasi Parit Lingkungan RT 013 Desa Bukit Raya (perlunya pembuatan parit lingkungan supaya air hujan tidak meluber keperumahan)	-	Bukit Raya		-	-
477	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Pembuatan Jalan RT 011 Desa Bukit Raya (Perlu Adanya Akses Jalan Di RT 011)	-	Bukit Raya		-	-
478	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Semenisasi Parit Lingkungan RT 010 Desa Bukit Raya (Tidak Lancarnya Pengaliran Air Limbah Sehingga Perlu Dibuat Semenisasi Parit Di RT 010)	-	Bukit Raya		-	-
479	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Semenisasi Parit Lingkungan RT 012 Desa Bukit Raya (Perlunya Semenisasi Parit Untuk Memperlancar Pembuangan Limbah Rumah Tangga)	-	Bukit Raya		-	-
480	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Semenisasi Parit Lingkungan RT 015 Desa Bukit Raya (Perlunya Semenisasi Parit Untuk Memperlancar Pembuangan Limbah Rumah Tangga)	-	Bukit Raya		-	-
481	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Semenisasi Parit Lingkungan RT 011 Desa Bukit Raya (Perlunya Semenisasi Parit Untuk	-	Bukit Raya		-	-

		Memperlancar Pembuangan Limbah Rumah Tangga)					
482	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Semenisasi Parit Lingkungan RT 013 Desa Bukit Raya (Perlu Adanya Semenisasi Parit Untuk Memperlancar Pembuangan Limbah Rumah Tangga)	-	Bukit Raya		-	-
483	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Semenisasi Parit Lingkungan RT 014 Desa Bukit Raya (Perlu Adanya Semenisasi Parit Untuk Memperlancar Pembuangan Limbah Rumah Tangga)	-	Bukit Raya		-	-
484	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Semenisasi Parit RT 010 Desa Bukit Raya (Kondisi Parit Yang Kurang Maksimal Sehingga Saat Musim Hujan Air Meluber Keperumahan)	-	Bukit Raya		-	-
485	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Jalan Rusak dan Berlubang	-	Karang Tunggal		-	-
486	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Jalan Rusak dan Berlubang	-	Karang Tunggal		-	-
487	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Semenisasi Parit RT 011 Desa Bukit Raya (Kondisi Parit Yang Kurang Maksimal Sehingga Saat Hujan Air	-	Bukit Raya		-	-

		Meluber Keperumahan)					
488	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Kondisi parit yang kurang kuat menampung air ketika musim hujan yang mengakibatkan tanah disekitarnya terkikis bahkan longsor	-	Karang Tunggal		-	-
489	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Semenisasi Parit RT 012 Desa Bukit Raya (Kondisi Parit Yang Kurang Maksimal Sehingga Saat Hujan Air Meluber Keperumahan)	-	Bukit Raya		-	-
490	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong	Pembuatan Gorong-gorong Jalan Usaha Tani RT 010 Desa Bukit Raya (Perlunya Gorong-gorong Untuk Memperlancar Aliran Air Diparit)	-	Bukit Raya		-	-
491	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Jalan licin dan berlumpur	-	Karang Tunggal		-	-
492	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Pembuatan Gorong-gorong Jalan Usaha Tani RT 014 Desa Bukit Raya (Perlunya Gorong-gorong Untuk Memperlancar Aliran Air Diparit)	-	Bukit Raya		-	-

493	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Jalan masi tanah dan sebagian berlumpur	-	Karang Tunggal		-	-
494	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	Jalan Kelompok Tani masi berupa tanah dan berlumpur ,kondisi lincin saat musim hujan tiba	-	Karang Tunggal		-	-
495	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	Pembuatan Gorong-gorong Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Maju Desa Bukit Raya (Perlu Adanya Gorong-gorong Untuk Memperlancar Aliran Air diparit)	-	Bukit Raya		-	-
496	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	pembuatan podium lapangan sepak bola belum terselesaikan sehingga perlu di lakukan kegiatan lanjutan	-	Karang Tunggal		-	-
497	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Tenggarong Seberang	jalan masi berlumpur dan susah dilewati kendaraan	-	Karang Tunggal		-	-
498	Pengadaan Mesin Paving Block Sampah	Pengadaan Pavingasi SDN 025 Kecamatan Tenggarong Seberang	-	Bukit Raya		-	-
499	Pembangunan gedung perpustakaan desa/Kelurahan	Pembangunan Perpustakaan MTS (Belum Adanya Perpustakaan Disekolahan)	-	Bukit Raya		-	-
500	Pembangunan Kolam Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	Pembangunan Kolam Unit Pembenihan Rakyat Desa Bukit Raya (Belum Adanya Kolam UPR di Desa Bukit Raya)	-	Bukit Raya		-	-

501	Rehabilitasi Kolam Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	Rehabilitasi Kolam Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	-	Bukit Raya		-	-
502	Penyediaan Benih Ikan / Udang	Penyediaan Benih Ikan / Udang (Untuk Menunjang Perekonomian Rakyat)	-	Bukit Raya		-	-
503	Penyediaan Pakan Ikan	Penyediaan Pakan Ikan (Untuk Membantu Warga Yang Memelihara Ikan)	-	Bukit Raya		-	-
504	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	PENINGKATAN BADAN JALAN DESA LOA ULUNG MENUJU DESA TANJUNG BATU	-	Loa Ulung		-	Lengkapi peta lokasi dan foto lokasi
505	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	PENINGKATAN JALAN SIMPANG 4 RT. 003	-	Loa Ulung		-	-
506	Penyediaan Unit Keramba	Penyediaan Unit Keramba (Untuk Medukung Penerapan Budidaya Perikanan)	-	Bukit Raya		-	-
507	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	PENINGKATAN JALAN KELOMPOK PERTANIAN RT.009	-	Loa Ulung		-	Lengkapi peta lokasi dan foto lokasi
508	Penyediaan Kolam Terpal	Penyediaan Kolam Terpal (Belum Adanya Pendukung Penerapan Budidaya Ikan)	-	Bukit Raya		-	-
509	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	PEMBANGUNAN TURAP JALAN RT. 10	-	Loa Ulung		-	Lengkapi peta lokasi dan foto lokasi

510	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Tenggarong Seberang	PEMBANGUNAN TURAP JALAN RT.008	-	Loa Ulung		-	Lengkapi peta lokasi dan foto lokasi
511	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	LANJUTAN SEMENISASI JALAN RT.006	-	Loa Ulung		-	Lengkapi peta lokasi dan foto lokasi
512	Pengadaan bibit Ternak Kerbau	Pengadaan Bibit Ternak Kerbau (BelumAdanya Kerbau Didesa Bukit Raya)	-	Bukit Raya		-	-
513	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	LANJUTAN SEMENISASI JALAN RT.007	-	Loa Ulung		-	Lengkapi peta lokasi dan foto lokasi
514	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan di dunia usaha	PERMOHONAN PELATIHAN SABLON DIGITAL BESERTA SAPRASNYA	-	Loa Ulung		-	-
515	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Pick Up)	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Pick Up) (Kurangnya Dermaga Pengangkut Sampah)	-	Bukit Raya		-	-
516	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Desa Bukit Raya (Kondisi Bangunan Sudah Tidak Layak)	-	Bukit Raya		-	-
517	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	-	Bukit Raya		-	-
518	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren (hibah uang)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren (Belanja hibah uang)	-	Bukit Raya		-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Tenggarong Seberang dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa ;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

III.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan

menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama satu tahun.

III.2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi SKPD. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan juga merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu tahun sampai dengan lima tahun kedepan, memformulasikan tujuan strategis dan mempertimbangkan sumber daya serta kemampuan yang dimiliki. Dengan merumuskan tujuan strategis, Kecamatan Tenggarong Seberang dapat diukur sejauh mana visi dan misi Kecamatan telah dicapai dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Agar keberhasilan Kecamatan Tenggarong Seberang dalam mencapai tujuan strategisnya dapat diukur, maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan disertai indicator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Rumusan Tujuan Renja Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pernyataan visi SKPD
2. Hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD

III.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Untuk selanjutnya dirumuskan Sasaran Renja Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya Tertib Administrasi Perkantoran dan Pengeloaan Data secara Profesional dan berbasis Tekhnologi Informasi;
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan SKPD dalam Penyelenggaran Urusan Pemerintahan sesuai Kewenangan dan Tupoksi Kecamatan;
3. Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan secara Komprehensif (lengkap) dan Tepat Waktu sesuai ketentuan;
4. Meningkatkan Semangat Gotong Royong, Swadaya, Prakarsa dan Inisiasi Masyarakat Dalam Berpartisipasi Membangun Desa dan Kecamatan ;
5. Optimalisasi Fungsi dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan, Jembatan, Drainase/Gorong-Gorong di Wilayah Kecamatan dan Desa;
6. Pembangunan secara menyeluruh menyangkut konektivitas antar wilayah Kecamatan;dan
7. Penanganan STUNTING secara maksimal.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV.1 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Kantor Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 mencerminkan rencana program dan kegiatan tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis (Renstra) Kantor Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026. Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra), Kantor Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program dan kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Kantor Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Kantor Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat serta pokok-pokok pikiran yang menjadi aspirasi masyarakat secara keseluruhan melalui instansi terkait dalam musrenbang kecamatan setiap tahunnya.

Pengolahan data menyangkut program dan kegiatan tersebut juga disesuaikan lagi dengan kondisi lapangan bahkan ketersediaan dana sebagai pendukung dari program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Bila kondisi lapangan kesiapan sumber daya dan anggaran tidaka ada keseuaian maka program kegiatan yang telah direncanakan bisa saja belum dilaksanakan atau tidak dilaksanakan atau bahkan gagal.

Adapun Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai tabel berikut :

Tabel TC 33
Rumusan Rencana program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Provinsi Kalimantan Timur -Kabupoaten Kutai Kartanegara

KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		98 Nilai	9.446.764.254,00				9.446.764.254,00
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9 Dokumen	340.000.000,00				340.000.000,00
7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tenggarong Seberang	2 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	50.000.000,00
7 01 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	1 Dokumen	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	25.000.000,00

7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	1 Dokumen	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	25.000.000,00
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	1 Dokumen	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	25.000.000,00
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	1 Dokumen	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	25.000.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	2 Laporan	180.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Laporan	180.000.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tenggarong Seberang	1 Laporan	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Laporan	10.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			7.096.607.994,00				7.096.607.994,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan	55 Orang/bulan	6.956.607.994,00	Dana Transfe		55 Orang/bulan	6.956.607.994,00

						Tenggarong Seberang			r Umum -Dana Bagi Hasil			
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Tenggarong Seberang	4 Dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		4 Dokumen	10.000.000,00
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	1 Laporan	10.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		1 Laporan	10.000.000,00
7	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kecamatan Tenggarong Seberang	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	5.000.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	4 Laporan	100.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		4 Laporan	100.000.000,00
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Tenggarong Seberang	2 Dokumen	15.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	15.000.000,00

7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			48.800.000,00				48.800.000,00
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	1 Dokumen	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	4.000.000,00
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	1 Laporan	40.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Laporan	40.800.000,00
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	1 Laporan	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Laporan	4.000.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			161.000.000,00				161.000.000,00
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Tenggarong Seberang	66 Paket	114.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		66 Paket	114.000.000,00
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Tenggarong Seberang	66 Dokumen	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana		66 Dokumen	4.000.000,00

										Bagi Hasil			
7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kecamatan Tenggarong Seberang	1 Dokumen	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	4.000.000,00
7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Tenggarong Seberang	1 Dokumen	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	4.000.000,00
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Tenggarong Seberang	2 Orang	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Orang	20.000.000,00
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Tenggarong Seberang	2 Orang	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Orang	15.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			745.256.260,00				745.256.260,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	1 Paket	29.413.760,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	29.413.760,00

7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	1 Paket	85.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	85.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	2 Paket	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Paket	100.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	1 Paket	70.155.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	70.155.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	312 Dokumen	3.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		312 Dokumen	3.600.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Tenggarong Seberang	12 Laporan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	50.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	12 Laporan	307.087.500,00	Dana Transfer Umum-Dana		12 Laporan	307.087.500,00

									Bagi Hasil				
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	100 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		100 Dokumen	50.000.000,00
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Tenggarong Seberang	12 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Dokumen	50.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah			180.000.000,00				180.000.000,00
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	1 Unit	180.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Unit	180.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			440.100.000,00				440.100.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Tenggarong Seberang	12 Laporan	5.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	5.100.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Kecamatan Tenggaron	12 Laporan	65.000.000,00	Dana Transfer		12 Laporan	65.000.000,00

						Daya Air dan Listrik yang Disediakan	g Seberang			Umum -Dana Bagi Hasil			
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	12 Laporan	20.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		12 Laporan	20.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tenggarong Seberang	12 Laporan	350.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		12 Laporan	350.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara			435.000.000,00				435.000.000,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Tenggarong Seberang	10 Unit	10.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		10 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Tenggarong Seberang	10 Unit	125.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		10 Unit	125.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Tenggarong Seberang	15 Unit	25.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana		15 Unit	25.000.000,00

										Bagi Hasil			
7	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Tenggarong Seberang	1 Unit	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Unit	25.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Tenggarong Seberang	1 Unit	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Unit	150.000.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Tenggarong Seberang	1 Unit	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Unit	100.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP		100 Persen	27.720.000.000,00				27.720.000.000,00
						Tingkat Aksebilitas wilayah Kecamatan		90 Persen					
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif			30.000.000,00				30.000.000,00
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tenggarong Seberang	1 Laporan	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana		1 Laporan	30.000.000,00

										Bagi Hasil			
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan			27.690.000.000,00				27.690.000.000,00
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kecamatan Tenggarong Seberang	1 Laporan	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Laporan	30.000.000,00
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Tenggarong Seberang	130 Laporan	27.660.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		130 Laporan	27.660.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif		100 Persen	330.000.000,00				330.000.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan			330.000.000,00				330.000.000,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Tenggarong Seberang	8 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		8 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tenggaron	4 Laporan	300.000.000,00	Dana Transfer Umum		4 Laporan	300.000.000,00

						g Seberang			-Dana Bagi Hasil			
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		85 Persen	200.000.000,00				200.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				200.000.000,00				200.000.000,00
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Tenggarong Seberang	36 Orang	195.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		36 Orang	195.000.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Tenggarong Seberang	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	5.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik		90 Persen	256.844.122,00				256.844.122,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan			256.844.122,00				256.844.122,00

7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Tenggarong Seberang	12 Dokumen	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Dokumen	25.000.000,00
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Tenggarong Seberang	12 Dokumen	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Dokumen	15.000.000,00
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Tenggarong Seberang	5 Dokumen	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5 Dokumen	15.000.000,00
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tenggarong Seberang	12 Dokumen	186.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Dokumen	186.000.000,00
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Tenggarong Seberang	18 Laporan	15.844.122,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		18 Laporan	15.844.122,00
TOTAL									37.953.608.376,00				37.953.608.376,00

BAB V
PENUTUP

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini dapat disusun. Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Komunikasi/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

pp.RENJA KECAMATAN LOA KULU

BAB I

P E N D A H U L U A N

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang diamanatkan serta Surat Edaran Bupati Kabupaten Kutai kartanegara Nomor : B – 370/BAPP/V.1/065.II/02/2022, sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi Masyarakat. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKP Daerah, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Renja Perangkat Daerah,

yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dirumuskan kedalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) dan mengacu kepada RKPD, yang memuat program, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang dalam *Grand Strategy* pembangunan yang dicanangkan sejak terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati priode tahun 2022-2026 serta keberhasilan (*succes story*) pada pelaksanaan pembangunan sebelumnya yakni Vitalisasi dan Aktualisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada priode sebelumnya.

Di dalam RPJMD Teknokratik Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022-2026, sesuai strategi dan arah kebijakan dimunculkan konsep Membangun Kabupaten dari Kecamatan yakni satu pendekatan baru yang merupakan terobosan dan juga pengejawantahan dari kebijakan pemerintah tentang bagaimana membangun Indonesia dari pinggiran. Secara garis besar konsep yang akan didorong di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah bagaimana memperkuat pelaksanaan pembangunan berbasis pemerataan kewilayahan dan juga penguatan peran masing stakeholder yang ada.

1.1 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9 Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10 Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

14 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

15 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

16 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Loa Kulu selama tahun 2023 dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD dan Renstra Kecamatan.

2. Tujuan :

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Camat Loa Kulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

1.3 Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Rencana Kerja Akhhir SKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daeah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2022.

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Tahun 2025memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan Visi Bupati Kutai Kartanegara,

“ MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”.

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Loa Kulu telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya dan telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu:

a. Menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.
b. Menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 Perangkat Daerah Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV, pelaksanaan kinerja Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan Perangkat Daerah dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), sebagaimana dijabarkan dalam table berikut ini:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)* Kabupaten Kutai Kartanegara

Kecamatan Loa Kulu Lembar :

.....

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan Renja PD (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian 2024 Target Renstra-PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja- PD Tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1					Urusan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintah Daerah									
1	0.1				Bidang Urusan Pemerintah Kecamatan Loa Kulu									
1	0.1	0.1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip Perangkat Daerah	41.027.293.275	9.308.022.702	8.904.910.268	0	0%	8.423.170.372	18.212.932.970	44%
1	0.1	0.1	0.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	864.639.715	31.867.000	0	0	0%	37.027.500	68.894.500	8%

1	0.1	0.1	0.1	0.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	55.000.000	6.190.000	0	0	0%	6.231.500	12.421.500	23%
1	0.1	0.1	0.1	0.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	20.000.000	0	0	0	0%	5.000.000	5.000.000	25%
1	0.1	0.1	0.1	0.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun	50.000.000	4.474.000	0	0	0%	4.500.000	8.974.000	18%
1	0.1	0.1	0.1	0.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	50.000.000	5.356.000	0	0	0%	5.396.000	10.752.000	22%
1	0.1	0.1	0.1	0.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD	50.000.000	5.900.000	0	0	0%	5.900.000	11.800.000	24%
1	0.1	0.1	0.1	0.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	509.639.715	4.980.000	0	0	0%	5.000.000	9.980.000	2%
1	0.1	0.1	0.1	0.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.000.000	4.967.000	0	0	0%	5.000.000	9.967.000	8%
1	0.1	0.1	0.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34.937.161.560	6.851.376.888	6.976.711.888	6.973.001.888	100%	6.858.398.320	20.682.777.096	59%
1	0.1	0.1	0.2	0.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tersedia	34.587.161.560	6.746.636.888	6.746.636.888	6.746.636.888	100%	6.753.338.320	20.246.612.096	59%
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	100.000.000	0	0	0%	0	100.000.000	0%
1	0.1	0.1	0.2	0.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	4.740.000	230.075.000	226.365.000	98%	5.060.000	236.165.000	72%
1	0.1	0.1	0.2	0.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	300.000.000	0	0	0	0%	100.000.000	100.000.000	33%

1	0.1	0.1	0.3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	370.000.000	404.750.000	0	0	0%	46.200.000	450.950.000	22%
1	0.1	0.1	0.3	0.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	160.000.000	400.000.000	0	0	0%	41.200.000	441.200.000	76%
1	0.1	0.1	0.3	0.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Dilakukan Penatausahaan	210.000.000	4.750.000	0	0	0%	5.000.000	9.750.000	5%
1	0.1	0.1	0.4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	0	3.200.000	135.190.000	133.650.000	99%	0	136.850.000	5%
1	0.1	0.1	0.4	0.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	0	3.200.000	135.190.000	133.650.000	99%	0	136.850.000	5%
1	0.1	0.1	0.5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	746.535.000	203.786.540	238.830.200	236.392.100	99%	316.820.000	756.998.640	100%
1	0.1	0.1	0.5	0.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik (Unit)	12.500.000	2.485.000	0	0	0%	2.500.000	4.985.000	40%
1	0.1	0.1	0.5	0.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang diadakan	100.000.000	44.126.140	143.072.000	140.844.000	98%	25.000.000	209.970.140	100%
1	0.1	0.1	0.5	0.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0	0	0%	0	0	0%
1	0.1	0.1	0.5	0.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	224.000.000	59.123.500	78.795.900	78.586.800	100%	40.000.000	177.710.300	79%
1	0.1	0.1	0.5	0.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia	25.000.000	11.999.900	16.962.300	16.961.300	100%	15.000.000	43.961.200	100%
1	0.1	0.1	0.5	0.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	28.500.000	5.400.000	0	0	0%	5.500.000	10.900.000	38%

1	0.1	0.1	0.5	0.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	100.000.000	10.172.000	0	0	0%	0	10.172.000	10%
1	0.1	0.1	0.5	0.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Terselenggara	126.535.000	67.530.000	0	0	0%	25.000.000	92.530.000	73%
1	0.1	0.1	0.5	0.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis Pada SKPD Yang Mendapatkan Penatausahaan	130.000.000	2.950.000	0	0	0%	3.820.000	6.770.000	5%
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	0	0	0%	200.000.000	200.000.000	5%
1	0.1	0.1	0.6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	0	0	0	0	0%	0	0	0%
1	0.1	0.1	0.6	0.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
1	0.1	0.1	0.6	0.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang di pelihara	0	0	0	0	0%	0	0	0%
1	0.1	0.1	0.6	0.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangun Gedung/Kantor yang diadakan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
1	0.1	0.1	0.6	0.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana,Prasarana Bangunan Gedung/Kantor yang diRehabilitasi	0	0	0	0	0%	0	0	0%
1	0.1	0.1	0.7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	2.933.957.000	1.011.611.274	891.596.180	842.719.099	95%	964.724.552	2.819.054.925	96%
1	0.1	0.1	0.7	0.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat Yang Tersedia	10.000.000	1.989.000	0	0	0%	2.000.000	3.989.000	40%
1	0.1	0.1	0.7	0.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	577.500.000	149.711.184	133.506.564	114.116.419	85,48%	115.000.000	378.827.603	66%
1	0.1	0.1	0.7	0.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	2.346.457.000	815.784.950	744.659.616	715.172.680	96%	832.724.552	2.363.682.182	100%

					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*0*	*44.126.140*	*13.430.000*	*13.430.000*	*100%*	*15.000.000*	*72.556.140*	*40%*
1	*0.1*	*0.1*	*0.8*		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Barang Milik Daerah*	*1.175.000.000*	*801.431.000*	*662.582.000*	*373.335.000*	*56%*	*200.000.000*	*1.374.766.000*	*100%*
1	*0.1*	*0.1*	*0.8*	*0.1*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Jabatan Yang Mendapatkan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan*	*1.050.000.000*	*182.731.000*	*239.702.000*	*236.687.000*	*98,74%*	*200.000.000*	*619.418.000*	*59%*
1	*0.1*	*0.1*	*0.8*	*0.2*	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Pelaratan dan Mesin lainnya yang mendapat Pemeliharaan*	*125.000.000*	*18.450.000*	*0*	*0*	*99,68%*	*0*	*18.450.000*	*15%*
1	*0.1*	*0.1*	*0.8*	*0.3*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*0*	*600.250.000*	*422.880.000*	*136.648.000*	*32%*	*0*	*736.898.000*	*59%*
1	*0.1*	*0.2*			*PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK*	*Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan*	*72.445.000.000*	*28.937.989.022*	*38.002.193.461*	*36.002.680.354*	*95%*	*31.844.585.000.000*	*31.909.525.669.376*	*100%*
						Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	*0*	*0*	*0*	*0*	*0%*	*0*	*0*	*0%*
						Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	*0*	*0*	*0*	*0*	*0%*	*0*	*0*	*0%*
1	*0.1*	*0.2*	*0.1*		*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0%*	*0*	*0*	*0%*
1	*0.1*	*0.2*	*0.1*	*0.1*	*Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	*Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0%*	*0*	*0*	*0%*

1	0.1	0.2	0.2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	620.000.000	9.185.662.082	0	0	0%	35.000.000	9.220.662.082	100%
1	0.1	0.2	0.2	0.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	120.000.000	4.762.005	0	0	0%	5.000.000	9.762.005	8%
1	0.1	0.2	0.2	0.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	500.000.000	96.751.100	0	0	0%	30.000.000	126.751.100	25%
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	0	9.084.148.977	0	0	0%	0	9.084.148.977	35%
1	0.1	0.2	0.3		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	71.825.000.000	19.752.326.940	38.002.193.461	36.002.680.354	95%	31.844.550.000.000	31.900.305.007.294	100%
1	0.1	0.2	0.3	0.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	0	2.925.000	0	0	100%	0	2.925.000	8%
1	0.1	0.2	0.3	0.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	75.000.000	0	0	0	0%	0	0	0%
1	0.1	0.2	0.3	0.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	71.750.000.000	19.749.401.940	38.002.193.461	36.002.680.354	94,74%	31.844.550.000.000	31.900.302.082.294	100%
														#DIV/0!
1	0.1	0.3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	95.000.000	9.092.378.977	1.010.674.468	591.504.140	59%	40.000.000	9.723.883.117	100%

1	*0.1*	*0.3*	*0.1*		*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa*	*95.000.000*	*9.092.378.977*	*1.010.674.468*	*591.504.140*	*59%*	*40.000.000*	*9.723.883.117*	*100%*
1	*0.1*	*0.3*	*0.1*	*0.1*	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	*Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan*	*75.000.000*	*8.230.000*	*87.390.600*	*65.208.000*	*75%*	*15.000.000*	*88.438.000*	*100%*
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti*	*0*	*9.084.148.977*	*923.283.868*	*526.296.140*	*57,00%*	*25.000.000*	*9.635.445.117*	*25%*
1	*0.1*	*0.3*	*0.1*	*0.2*	*Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	*persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0%*
1	*0.1*	*0.3*	*0.1*	*0.3*		*Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*20.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0%*
1	*0.1*	*0.4*			*PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM*	*Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*820.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0%*	*130.194.291*	*130.194.291*	*16%*
1	*0.1*	*0.4*	*0.1*		*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan*	*820.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0%*	*130.194.291*	*130.194.291*	*16%*

1	*0.1*	*0.4*	*0.1*	*0.1*	*Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*20.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0%*	*0*	*0*	*0%*
1	*0.1*	*0.4*	*0.1*	*0.2*	*Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	*Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*800.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0%*	*130.194.291*	*130.194.291*	*16%*
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	*Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti*	*800.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0%*	*130.000.000*	*130.000.000*	*16%*
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*	*800.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0%*	*130.000.000*	*130.000.000*	*16%*
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*800.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0%*	*130.000.000*	*130.000.000*	*16%*
1	*0.1*	*0.5*			*PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA*	*Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik*	*90.000.000*	*56.780.000*	*0*	*0*	*0%*	*50.000.000*	*106.780.000*	*119%*
1	*0.1*	*0.5*	*0.1*		*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan*	*90.000.000*	*28.390.000*	*0*	*0*	*0%*	*25.000.000*	*53.390.000*	*59%*
1	*0.1*	*0.5*	*0.1*	*0.1*	*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	*Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa*	*90.000.000*	*28.390.000*	*0*	*0*	*0%*	*25.000.000*	*53.390.000*	*59%*
1	*0.1*	*0.5*	*0.1*	*0.2*	*Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	*Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0%*	*0*	*0*	*0%*
							23.047.458.655	*31.301.096.343*	*41.563.881.489*	*38.798.839.693*	*93%*	*40.627.914.663*	*31.945.849.438.945*	*100%*

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari capaian kinerja pelayanan Kecamatan Loa Kulu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022–2026. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Loa Kulu dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat rakyat. tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat DaerahKecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator*)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Nilai Sakip Perangkat Daerah											
I	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			376.892.000	168.927.943	173.927.943	173.927.943	0	31.867.000	37.027.500	170.000.000	
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0	15.000.000	10.000.000	10.000.000	0	6.190.000	6.231.500	20.000.000	
2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun			0	-	-	-	0	0	5.000.000	20.000.000	
3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun			0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	4.474.000	4.500.000	20.000.000	
4	Jumlah Dokumen DPA SKPD			0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	5.356.000	5.396.000	20.000.000	
5	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD			0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	5.900.000	5.900.000	20.000.000	
6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0	93.927.943	103.927.943	103.927.943	0	4.980.000	5.000.000	20.000.000	
7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	4.967.000	5.000.000	50.000.000	
II	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			230.075.000	7.027.432.312	6.977.432.312	6.977.432.312	6.973.001.888	6.851.376.888	6.958.398.320	6.565.152.051	

1	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tersedia			0	6.917.432.312	6.917.432.312	6.917.432.312	6.746.636.888	6.746.636.888	6.753.338.320	6.395.152.051	
2	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000	-	
3	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			230.075.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	226.365.000	4.740.000	5.060.000	20.000.000	
4	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			0	100.000.000	50.000.000	50.000.000		0	100.000.000	150.000.000	
III	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			0	90.000.000	70.000.000	70.000.000	0	404.750.000		61.200.000	
1	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD			0	40.000.000	30.000.000	30.000.000	0	400.000.000	41.200.000	41.200.000	

2	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Dilakukan Penatausahaan	0	50.000.000	40.000.000	40.000.000	0	4.750.000	5.000.000	20.000.000
IV	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	135.190.000	0	0	0	133.650.000	3.200.000	-	200.000.000
1	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	135.190.000	0	0	0	133.650.000	3.200.000	0	200.000.000
V	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	238.830.200	379.307.000	348.307.000	154.307.000	236.392.100	203.786.540	316.820.000	847.000.000
	Jumlah Komponen Listrik (Unit)	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.485.000	2.500.000	15.000.000
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	143.072.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	140.844.000	44.126.140	25.000.000	100.000.000
	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000
	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	78.795.900	40.000.000	40.000.000	46.000.000	78.586.800	59.123.500	40.000.000	100.000.000
	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia	16.962.300	5.000.000	5.000.000	5.000.000	16.961.300	11.999.900	15.000.000	25.000.000
	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0	6.500.000	5.500.000	5.500.000	0	5.400.000	5.500.000	7.000.000
	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	10.172.000	0	50.000.000
	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Terselenggara	0	25.307.000	25.307.000	25.307.000	0	67.530.000	25.000.000	200.000.000
	Jumlah Arsip Dinamis Pada SKPD Yang Mendapatkan Penatausahaan	0	50.000.000	20.000.000	20.000.000	0	2.950.000	3.820.000	50.000.000
	Jumlah data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0	200.000.000	250.000.000
VI	Jumlah Barang Milik Daerah	0	0	0	0	0	0		304.524.000
	Jumlah Mebel yang diadakan	0	0	0	0	0	0	0	104.524.000
	Jumlah Peralatan dan Mesin yang di pelihara	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000

	Jumlah Bangun Gedung/Kantor yang diadakan	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000
	Jumlah Sarana,Prasarana Bangunan Gedung/Kantor yang diRehabilitasi	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000
VII	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	893.596.180	586.791.400	586.791.400	586.791.400	844.719.099	1.011.611.274	947.724.552	1.057.724.552

	Jumlah Surat Menyurat Yang Tersedia	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.989.000	2.000.000	5.000.000
	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	133.506.564	115.500.000	115.500.000	115.500.000	114.116.419	149.711.184	115.000.000	185.000.000
	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	744.659.616	469.291.400	469.291.400	469.291.400	715.172.680	815.784.950	832.724.552	832.724.552
	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.430.000	0	0	0	13.430.000	44.126.140	-	35.000.000
VIII	Jumlah Barang Milik Daerah	687.582.000	315.000.000	215.000.000	215.000.000	373.335.000	801.431.000		644.000.000
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Jabatan Yang Mendapatkan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan	239.702.000	290.000.000	190.000.000	190.000.000	236.687.000	182.731.000	0	569.000.000
	Jumlah Pelaratan dan Mesin lainnya yang mendapat Pemeliharaan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	18.450.000	0	25.000.000
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	422.880.000	0	0	0	136.648.000	600.250.000	0	50.000.000
IX	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	3.005.135.866	0	0	0	36.002.680.354	28.937.989.022		
X	Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000
	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000
XIII	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	100.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	9.185.662.082	35.000.000	100.000.000
	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	0	0	0	0	0	4.762.005	0	

	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	96.751.100	5.000.000	175,000,000
	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	9.084.148.977	30.000.000	100.000.000
XIV	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	2.905.135.866	20.299.960.000	31.859.550.000	14.325.000.000	36.002.680.354	19.752.326.940	31.844.550.000	15.773.409.000

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	0	0	0	0	0	2.925.000	0	15.000.000
	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2.905.135.866	20.284.960.000	31.844.550.000	14.310.000.000	36.002.680.354	9.749.401.940	31.844.550.000	15.743.409.000
XIV	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	1.010.674.468	220.000.000	220.000.000	220.000.000	591.504.140	9.092.378.977	15.000.000	650.000.000
	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	1.010.674.468	220.000.000	220.000.000	220.000.000	591.504.140	9.092.378.977	15.000.000	650.000.000
	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	87.390.600	15.000.000	15.000.000	15.000.000	65.208.000	8.230.000	15.000.000	25.000.000
	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	923.283.868	5.000.000	5.000.000	5.000.000	526.296.140	9.084.148.977	0	300.000.000
	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	25.000.000
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000

XV	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	0	0	0		0	0	0	350.000.000
	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	0	0	0	0	0		50.000.000
	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	0	0	0	0	0		300.000.000
XVI	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	0	0	0	0	0	0		
XVII	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	0	0	0	0		300.000.000
	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	0	0	0	0	0		300.000.000
XVIII	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	0	50.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	28.390.000	25.000.000	250.000.000
XIX	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	0	50.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	28.390.000	25.000.000	250.000.000

	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	0	50.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	28.390.000	25.000.000	150.000.000
	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000
			27.434.683.130	23.047.458.655	23.412.458.655	38.798.839.693	30.489.093.696	40.627.914.663	27.398.009.603

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi KPD.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dalam pasal 126 menerangkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagaian wewenang Bupati /Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan juga merupakan Perangkat Daerah Kabupaten / Kotayang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati /Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sedang fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan kegiatan kecamatan.
2. Pelaksanaan koordinasi atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di
3. Pelaksanaan koordinasi atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.
4. Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
5. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.`
6. Pelaksanaan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
7. Pelaksanaan pelayanan umum kepada masyarakat.
8. Pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas layanan umum di wilayah kecamatan.
9. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.

Pelaksanaan penatausahaan/urusan kesekretariatan kecamatan identifikasi permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Loa Kulu dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya:

1. Permasalahan Internal:

a. Kualifikasi staf yang masih belum sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi
b. Belum dapat dilaksanakannya beberapa point pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat Karena belum adanya petunjuk tekhnis serta belum disiapkannya tenaga teknis yang sudah terlatih.

2. Permasalahan Eksternal:
    a. Kesadaran masyarakat masih rendah untuk menyiapkan dan memiliki kelengkapan administrasi kependudukan serta dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh setiap warga yang merupakan produk layanan pemerintah kecamatan.
    b. Jarak antara desa-desa dan ibukota Kecamatan yang relative jauh serta jalur transportasi yang masih sulit dan mahal menyebabkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa masih belum maksimal dilaksanakan.
    c. Belum maksimalnya keterlibatan pihak ketiga (perusahaan) dalam membantu kegiatan pemberdayaan dan pembangunan wilayah desayang menjadi lokasi kegiatan usaha perusahaan tersebut

Hal-hal yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada para staf kecamatan tentang tugas dan fungsi kecamatan serta keahlian yang harus dipelajari dan dimiliki oleh setiap staf
2. Melaksanakan jenis kewenangan yang sudah dapat dilaksanakan dan mengkoordinasikan dengan pihak- pihak terkait jenis kewenangan yang belum bisa dilaksanakan
3. Melaksanakan jenis kewenangan yang sudah dapat dilaksanakan dan mengkoordinasikan dengan pihak- pihak terkait jenis kewenangan yang belum bisa dilaksanakan
4. Melakukan sosialisasi kepada aparatur desa dan warga desa tentang pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan serta dokumen-dokumen lainnya yang memang harus dimiliki oleh warga masyarakat
5. Memaksimalkan rapat koordinasi pertriwulan dalam rangka melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan pemberdayaan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa
6. Melibatkan pihak perusahan dalam kegiatan Musrenbang desa dan Musrenbang Kecamatan dalam rangka singkronisasi rencana kegiatan pemerintahan desa yang bisa dibantu dilaksanakan oleh pihak perusahaan

7. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang status lahan KBK dan mengusulkan kepada pihak terkai tuntuk mengeluarkan sebagian lahan yang menjadilokasi kegiatan usaha masyarakat yang termasuk dalam lahan KBK agar bisa dimiliki dan diusahakan oleh masyarakat
8. Potensi Perkebunan Kelapa Sawit yaitu terdapatnya perkebunan kelapa sawit PT.Niaga Mas gemilang yang berlokasi di desa Jonggon dan PT Kota Bangun Play station yang berlokasi di Desa Sungai Payang Potensi Pertanian yaitu terdapatnya usaha pertanian padi sawah dan padi ladang di desa hampir disemua 15 Desa.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Review terhadap Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025
2. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan, Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai Lampiran Tabel berikut ini :

Tabel..(nomor sesuaikan kebutuhan)

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : ..... Lembar : .....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Loa Kulu	Nilai Sakip Perangkat Daerah	74	8.222.628.603	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Loa Kulu	Nilai Sakip Perangkat Daerah	74	8.222.628.603	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		37.027.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.231.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	2 Dokumen	20,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	1 Dokumen	20,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun	1 Dokumen	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD yang Disusun	1 Dokumen	20,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	5.396.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	20,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD	1 Dokumen	5.900.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD	1 Dokumen	20,000,000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	20,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		6.958.398.320	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		6.565.152.051	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Loa Kulu	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tersedia	1 Dokumen	6.753.338.320	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Loa Kulu	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tersedia	1 Dokumen	6.395.152.051	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Loa Kulu	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	100.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Loa Kulu	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	5.060.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	20.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Dokumen	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Se mesteran SKPD	1 Dokumen	150.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		46.200.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		61.200.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Dokumen	41.200.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Dokumen	41.200.000	

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Dilakukan Penatausahaan	1 Dokumen	5.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Dilakukan Penatausahaan	1 Dokumen	20.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		115.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Loa Kulu	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Loa Kulu	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	0	115.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		316.820.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		847.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Loa Kulu	Jumlah Komponen Listrik (Unit)	1 Dokumen	2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Loa Kulu	Jumlah Komponen Listrik (Unit)	1 Dokumen	15.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loa Kulu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang diadakan	2 Unit	25.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loa Kulu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang diadakan	2 Unit	100.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Loa Kulu	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah	0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Loa Kulu	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah	0	50.000.000	
			Tangga					Tangga			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Loa Kulu	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	40 Jenis	40.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Loa Kulu	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	35 Jenis	100.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Loa Kulu	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia	2500 Lembar	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Loa Kulu	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia	2500 Lembar	25.000.000	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Loa Kulu	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	720 Eksemplar	5.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Loa Kulu	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	720 Eksemplar	7.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Loa Kulu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	50 Kali	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Loa Kulu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	50 Kali	50.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Loa Kulu	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Terselenggara	40 Kali	25.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Loa Kulu	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Terselenggara	40 Kali	200.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah Arsip Dinamis Pada SKPD Yang Mendapatkan Penatausahaan	100 Dokumen	3.820.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah Arsip Dinamis Pada SKPD Yang Mendapatkan Penatausahaan	100 Dokumen	50.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30 Kegiatan	200.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30 Kegiatan	250.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Loa Kulu	Jumlah Barang Milik Daerah	100	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Loa Kulu	Jumlah Barang Milik Daerah	100	504.524.000	
	Pengadaan Mebel	Loa Kulu	Jumlah Mebel yang diadakan	0	0	Pengadaan Mebel	Loa Kulu	Jumlah Mebel yang diadakan	71	104.524.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Peralatan dan Mesin yang di pelihara	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Peralatan dan Mesin yang di pelihara	10	150.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Bangun Gedung/Kantor yang diadakan	0	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Bangun Gedung/Kantor yang diadakan	4	200.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Sarana,Prasarana Bangunan Gedung/Kantor yang diRehabilitasi	0	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Sarana,Prasarana Bangunan Gedung/Kantor yang diRehabilitasi	20	50.000.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Loa Kulu	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100	949.724.552	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Loa Kulu	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		1.057.724.552	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Loa Kulu	Jumlah Surat Menyurat Yang Tersedia	600 Lembar	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Loa Kulu	Jumlah Surat Menyurat Yang Tersedia	600 Lembar	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Loa Kulu	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	72 Rekening	115.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Loa Kulu	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	72 Rekening	185.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Loa Kulu	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	361 Orang	832.724.552	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Loa Kulu	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	361 Orang	832.724.552	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loa Kulu	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loa Kulu	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	35.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Loa Kulu	Jumlah Barang Milik Daerah			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Loa Kulu	Jumlah Barang Milik Daerah		644.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Loa Kulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Jabatan Yang Mendapatkan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan	8 Unit	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Loa Kulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Jabatan Yang Mendapatkan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan	8 Unit	569.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Pelaratan dan Mesin lainnya yang mendapat Pemeliharaan	5 Unit	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Pelaratan dan Mesin lainnya yang mendapat Pemeliharaan	5 Unit	25.000.000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	50.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Loa Kulu	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Loa Kulu	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	0		
		Loa Kulu	Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	0	0		Loa Kulu	Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	0		
		Loa Kulu	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	0	0		Loa Kulu	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	0		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	0	0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	0	50.000.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Loa Kulu	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	0	0	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Loa Kulu	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	0	50.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada	Loa Kulu	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi		10.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada	Loa Kulu	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi		275.000.000	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	1 Laporan	5.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	0	175.000.000	

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	15	5.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	15	100.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Loa Kulu	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP		31.844.550.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Loa Kulu	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP		15.773.409.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Loa Kulu	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	0	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Loa Kulu	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	0	15.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Loa Kulu	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	0	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Loa Kulu	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	0	15.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Loa Kulu	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	170 kegiatan	31.844.550.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Loa Kulu	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	170 kegiatan	15.743.409.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Loa Kulu	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif		15.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Loa Kulu	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Loa Kulu	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		15.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Loa Kulu	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		350.000.000	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Loa Kulu	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100 Orang	15.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Loa Kulu	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100 Orang	25.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	0	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	0	300.000.000	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Loa Kulu	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	0	0	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Loa Kulu	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	0	25.000.000	
		Loa Kulu	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0		Loa Kulu	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Loa Kulu	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum		0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Loa Kulu	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Loa Kulu	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan		130.194.291	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Loa Kulu	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan		350.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	50.000.000	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Loa Kulu	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	130.194.291	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Loa Kulu	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	300.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Loa Kulu	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Loa Kulu	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	0	300.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Loa Kulu	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	130.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Loa Kulu	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	300.000.000	

	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Loa Kulu	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 kegiatan	130.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Loa Kulu	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 kegiatan	300.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Loa Kulu	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	0	25.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Loa Kulu	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	0	250.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Loa Kulu	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	0	25.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Loa Kulu	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	0	250.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Loa Kulu	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	15 Desa	25.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Loa Kulu	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	15 Desa	150.000.000	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Loa Kulu	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	0	0	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Loa Kulu	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	0	100.000.000	
					23.104.538.655					27.398.009.603	

2.5. Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten Kebijakan Kabupaten Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan nasional di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik

   Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus dilakukan secara nyata, melalui beberapa langkah berikut :

a. Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik
b. Penerapam standar pelayanan minimal pelayanan publik;
c. Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik.

2. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah akan terus ditingkatkan melalui kebijakan berikut :

a. Penataan kelembagaan instansi pemerintah sejalan dengan prinsip *structure follow fuction;*
b. Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan;
c. Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM aparatur;
d. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

a. Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi;
b. Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi;
c. Perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah

Kebijakan Kabupaten

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara ditujukan untuk menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, baik antar-Kecamatan, antar-ruang, antar-waktu,

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Loa Kulu**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**		
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Loa Kulu**	**Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**		
1	Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	2 Dokumen	
2	Koordinasi dan Penyusunan DokumenRKA-SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yangDisusun	1 Dokumen	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun	1 Dokumen	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	
5	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen DPA PerubahanSKPD	1 Dokumen	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	
2	**Administrasi Keuangan PerangkatDaerah**	**Loa Kulu**	**Jumlah laporan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN**		
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Loa Kulu	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASNYang Tersedia	1 Dokumen	
9	Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD	Loa Kulu	Jumlah Kegiatan PelaksanaanAkuntansi SKPD	1 Dokumen	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD	1 Dokumen	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	
3	**Administrasi Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah**	**Loa Kulu**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**		
'12	Rekonsiliasi dan Penyusunan LaporanBarang Milik Daerah pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Barang Milik DaerahPada SKPD	1 Dokumen	
'13	Penatausahaan Barang Milik Daerahpada SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Barang Milik DaerahPada SKPD Yang Dilakukan Penatausahaan	1 Dokumen	

4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		
14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Loa Kulu	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	60 Stel	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Loa Kulu	Jumlah Komponen Listrik (Unit)	1 Dokumen	
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loa Kulu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang diadakan	2 Unit	
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Loa Kulu	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20 Jenis	
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Loa Kulu	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	35 Jenis	
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Loa Kulu	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia	2500 Lembar	
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Loa Kulu	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	720 Eksemplar	
21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Loa Kulu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	50 Kali	
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Loa Kulu	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Terselenggara	40 Kali	
23	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah Arsip Dinamis Pada SKPD Yang Mendapatkan Penatausahaan	100 Dokumen	
24	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30 Kegiatan	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Loa Kulu	Jumlah Barang Milik Daerah	0	
25	Pengadaan Mebel	Loa Kulu	Jumlah Mebel yang diadakan	2 Set	
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Peralatan dan Mesin yang di pelihara	2 Unit	
27	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Bangun Gedung/Kantor yang diadakan	1 Unit	
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Sarana,Prasarana Bangunan Gedung/Kantor yang diRehabilitasi	1 Unit	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Loa Kulu	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		

29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Loa Kulu	Jumlah Surat Menyurat Yang Tersedia	600 Lembar	
30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Loa Kulu	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	72 Rekening	
31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Loa Kulu	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	361 Orang	
32	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loa Kulu	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Unit	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Loa Kulu	Jumlah Barang Milik Daerah		
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Loa Kulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Jabatan Yang Mendapatkan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan	8 Unit	
34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Pelaratan dan Mesin lainnya yang mendapat Pemeliharaan	5 Unit	
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Loa Kulu	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	0	
		Loa Kulu	Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	0	
		Loa Kulu	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	0	
9	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	0	
36	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Loa Kulu	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	15 Kegiatan	
10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada	Loa Kulu	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi		
37	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	1 Laporan	
38	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	15 Kegiatan	
39	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	15 Kegiatan	

11	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Loa Kulu	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP		
40	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Loa Kulu	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	15 Laporan	

41	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Loa Kulu	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	15 Laporan	
42	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Loa Kulu	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	170 kegiatan	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Loa Kulu	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif		
12	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Loa Kulu	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Loa Kulu	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100 Orang	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	3 Lembaga	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Loa Kulu	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	15 Kegiatan	
		Loa Kulu	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 Kegiatan	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Loa Kulu	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
13	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Loa Kulu	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15 Kegiatan	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Loa Kulu	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 kegiatan	
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Loa Kulu	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	0	

14	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Loa Kulu	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Loa Kulu	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 kegiatan	
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Loa Kulu	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	0	
15	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Loa Kulu	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	0	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Loa Kulu	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	15 Desa	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Loa Kulu	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	15 Desa	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten Kebijakan Kabupaten

Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan nasional di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut :

1 Peningkatan kualitas pelayanan publik

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus dilakukan secara nyata, melalui beberapa langkah berikut :

a. Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik
b. Penerapam standar pelayanan minimal pelayanan publik;
c. Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik

2 Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah akan terus ditingkatkan melalui kebijakan berikut :

a. Penataan kelembagaan instansi pemerintah sejalan dengan prinsip *structure follow fuction;*
b. Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan;

3 Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM aparatur;

4. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

5. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

a. Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi;
b. Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi;
c. Perluassan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah

Kebijakan Kabupaten

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara ditujukan untuk menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas

pembangunan, baik antar-Kecamatan, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah. Kecuali itu juga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan, serta untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sekaligus untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program. Kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten dalam bidang Pelayanan diarahkan pada percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat;
2. Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggungjawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima;

5. Mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan kebijakan layanan publik.

Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan Kecamatan Loa Kulu disusun dengan memperhatikan Kebijakan nasional sertajuga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berisi sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan pokok, menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sehingga program dan kegiatan Kecamatan Loa Kulu telah sesuai dengan kebijakan Kabuapetan yang gunanya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan :

Tujuan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategik, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun ke depan dari tahun 2022 s/d 2026. Namun tujuan Rencana Kerja lebih mengarah pada periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2023, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Masyarakat adminisrasi yang benar dan akurat
2. Terpenuhinya pelayanan yang cepat, tepat dan nyaman.
3. Mewujudkan aparatur yang loyal dan berdedikasi tinggi
4. Mewujudkan hasil kinerja yang akuntabel
5. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan PNS guna mewujudkan aparatur pemerintah yang berkualitas, akuntabel dan professional
6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan akuntabel

Sasaran :

Sasaran ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan organisasi (SKPD) yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Kecamatan Loa Kulu, antara lain:

1. Meningkatnya kepuasan Masyarakat pemakai jasa layanan Masyarakat
2. Terwujudnya kepuasan Masyarakat sehingga dapat bekerja secara maksimal dalam melaksanakan pelayanan
3. Terwujudnya aparatur pemerintah yang berkualitas dan profesionalisme.
4. Meningkatnya jasa layanan kualitas dan kemampuan sumberdaya aparatur.

3.3 Terpenuhinya target waktu pelayanan dan meningkatnya kenyamanan Masyarakat

3.4 Program dan Kegiatan

Adapun rencana program pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
2. Program Penyelengggaraan Pemeritahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemerdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Pelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.3 Program dan Kegiatan

Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 Kantor Camat Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis (Renstra) Kantor Camat Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 – 2026. Pada dasarnya Rancangan Rencana Kerja tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Kantor Camat Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024.

Target kinerja mereprensentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2023 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya. Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra), Kantor Camat Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Kantor Camat Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Kantor Camat Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat.

Adapun Rumusan Rancangan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai tabel berikut:

Tabel (nomor sesuaikan kebutuhan)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Loa Kulu lembar 1 dari 6

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikati
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Loa Kulu	100	7.222.088.603	APBD		100	7.645.178.394
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Loa Kulu	100	41.296.000	APBD		100	168.927.943
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Loa Kulu	2 Dokumen	10.000.000	APBD		2 Dokumen	10.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	Loa Kulu	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun	Loa Kulu	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	10.000.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Loa Kulu	1 Dokumen	5.396.000	APBD		1 Dokumen	10.000.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD	Loa Kulu	1 Dokumen	5.900.000	APBD		1 Dokumen	10.000.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Loa Kulu	2 Dokumen	5.000.000	APBD		2 Dokumen	103.927.943
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loa Kulu	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	25.000.000

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Loa Kulu	100	5.532.572.051	APBD		100	6.455.152.051
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tersedia	Loa Kulu	1 Dokumen	6.395.152.051	APBD		1 Dokumen	6.395.152.051
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Loa Kulu	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	0
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Loa Kulu	1 Dokumen	5.060.000	APBD		1 Dokumen	10.000.000
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Loa Kulu	1 Dokumen	132.360.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Loa Kulu	100	51.200.000	APBD		100	70.000.000
12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Loa Kulu	1 Dokumen	41.200.000	APBD		1 Dokumen	30.000.000
13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Dilakukan Penatausahaan	Loa Kulu	1 Dokumen	10.000.000	APBD		1 Dokumen	40.000.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Loa Kulu	100	0	APBD		100	0
14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Loa Kulu	60 Stel	0	APBD		0	0
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Loa Kulu	100	305.296.000	APBD		100	149.307.000
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik (Unit)	Loa Kulu	1 Dokumen	2.500.000	APBD		1 Dokumen	2.500.000
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang diadakan	Loa Kulu	2 Unit	25.000.000	APBD		2 Unit	25.000.000
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Loa Kulu	30 Jenis	0	APBD		30 Jenis	0

18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	Loa Kulu	35 Jenis	40.000.000	APBD		35 Jenis	46.000.000
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia	Loa Kulu	2500 Lembar	14.516.000	APBD		2500 Lembar	5.000.000
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Loa Kulu	720 Eksemplar	0	APBD		720 Eksemplar	5.500.000
21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Loa Kulu	50 Kali	0	APBD		50 Kali	25.000.000
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Terselenggara	Loa Kulu	40 Kali	200.000.000	APBD		40 Kali	20.307.000
23	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis Pada SKPD Yang Mendapatkan Penatausahaan	Loa Kulu	100 Dokumen	3.280.000	APBD		100 Dokumen	20.000.000
24	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Loa Kulu	30 Kegiatan	20.000.000	APBD		30 Kegiatan	0
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Loa Kulu	100	0	APBD		100	0
25	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Loa Kulu	5 Set	0	APBD		5 Set	0
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang di pelihara	Loa Kulu	5 Unit	0	APBD		5 Unit	0
27	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangun Gedung/Kantor yang diadakan	Loa Kulu	1 Unit	0	APBD		1 Unit	0
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana,Prasarana Bangunan Gedung/Kantor yang diRehabilitasi	Loa Kulu	15 Unit	0	APBD		15 Unit	0
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Loa Kulu	100	1.041.724.552	APBD		100%	586.791.400
29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat Yang Tersedia	Loa Kulu	600 Lembar	2.000.000	APBD		600 Lembar	2.000.000

30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Loa Kulu	72 Rekening	207.000.000	APBD		72 Rekening	115.500.000
31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Loa Kulu	361 Orang	832.724.552	APBD		361 Orang	469.291.400
32	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loa Kulu	20 Unit	0	APBD		0	0
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Loa Kulu	100	250.000.000	APBD		100%	215.000.000
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Jabatan Yang Mendapatkan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan	Loa Kulu	8 Unit	250.000.000	APBD		8 Unit	190.000.000
34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pelaratan dan Mesin lainnya yang mendapat Pemeliharaan	Loa Kulu	5 Unit	0	APBD		5 Unit	25.000.000
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Kulu	1 Unit	0	APBD		0	0
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Loa Kulu	100	10.757.296.000	APBD	100	100	14.445.000.000
		Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	Loa Kulu	15		APBD	15	100	0
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Loa Kulu	5		APBD	5	100	
11	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	Loa Kulu	100	0	APBD		100	0

36	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	Loa Kulu	15 Kegiatan	0	APBD		15 Kegiatan	0
12	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Loa Kulu	100	11.000.000	APBD		100	120.000.000
37	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Loa Kulu	15 Kegiatan	5.000.000	APBD		15 Kegiatan	20.000.000
38	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Loa Kulu	15 Kegiatan	6.000.000	APBD		15 Kegiatan	100.000.000
13	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Loa Kulu	100	10.746.296.000	APBD		100	14.325.000.000
39	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Loa Kulu	15 Kegiatan	5.000.000	APBD		15 Kegiatan	0
40	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Loa Kulu	15 Kegiatan	891.296.000	APBD		15 Kegiatan	15.000.000
41	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Loa Kulu	12 kegiatan	9.850.000.000	APBD		170 kegiatan	14.310.000.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Loa Kulu	100	912.296.296	APBD		100	15.000.000
14	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Loa Kulu	100	912.295.295	APBD		100	15.000.000

42	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Loa Kulu	100 Orang	15.000.000	APBD		100 Orang	15.000.000
43	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Loa Kulu	15 Kegiatan	6.000.000	APBD		15 Kegiatan	0
44	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Loa Kulu	15 Kegiatan	0	APBD		15 Kegiatan	0
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	0	891.296.000	APBD		0	0
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Loa Kulu	100		APBD		100	205.000.000
15	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Loa Kulu	100	0	APBD		100	205.000.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Loa Kulu	15 Kegiatan	0	APBD		15 Kegiatan	5.000.000

	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Loa Kulu	2 Kegiatan	0	APBD		2 Kegiatan	200.000.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Loa Kulu	100	25.000.000	APBD		100	200.000.000
16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Loa Kulu	2 Kegiatan	25.000.000	APBD		2 Kegiatan	200.000.000
45	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Loa Kulu	2 kegiatan	25.000.000	APBD		2 kegiatan	200.000.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Loa Kulu	100	25.000.000	APBD		100	10.000.000
17	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Loa Kulu	100	25.000.000	APBD		100	10.000.000
46	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Loa Kulu	15 Desa	25.000.000	APBD		15 Desa	10.000.000
47	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Loa Kulu	15 Desa		APBD		0	0
					19.324.924.603				23.047.458.655

DAFTAR RENCANA KEGIATAN INFRASTRUKTUR KECAMATAN LOA KULU PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2024

	Kegiatan Kuota Kecamatan		Loa Kulu	100	4.600.000.000	APBD		
1	Pembutan Badan Jalan Sebelah Pak. Parmin	Panjang jalan yang di bangun	Desa Jonggon Jaya	100 m	200.000.000	APBD	0	0
2	Pembuatan Badan Jalan tantai	Panjang jalan yang di bangun	Desa Jonggon Jaya	100 m	200.000.000	APBD	0	0
3	Pembersihan Bahu Jalan Loh Sumber ke Jembayan Dalam	Panjang bahu jalan yang dirawat	Desa Loh Sumber	5000 m	200.000.000	APBD	0	0
4	Pembersihan Bahu Jalan Jonggon jaya ke Sungai Payang	Panjang bahu jalan yang dirawat	Desa Sungai Payang	5000 m	200.000.000	APBD	0	0
5	Pemebersihan Bahu Jalan Margahayu ke Jonggon Desa	Panjang bahu jalan yang dirawat	Desa Jonggon	10.000 m	200.000.000	APBD	0	0
6	Lanjutan Pembangunan Taman Litarasi Kecamatan Loa Kulu	Luas Taman yang dibangun	Desa Loa Kulu Kota	100 m2	200.000.000	APBD	0	0
7	Lanjutan Pembuatan Pagar TPS Kecamatan Loa Kulu	Panjang pagar yang dibangun	Desa Loa Kulu Kota	100 m	200.000.000	APBD	0	0
8	Turap Pasangan Parit Depan TPS Kecamatan Loa Kulu	Panjang Turap yang dibangun	Desa Loa Kulu Kota	100 m	200.000.000	APBD	0	0
9	Turap Pasangan Taman Literasi	Panjang Turap yang dibangun	Desa Loa Kulu Kota	100 m	200.000.000	APBD	0	0
10	Turap Pasangan Parit Jl. Bayangkara Loa Kulu Kota	Panjang Drainase yang dibangun	Desa Loa Kulu Kota	100 m	200.000.000	APBD	0	0
11	Lanjutan Semenisasi Jl. Gunung Ore Desa Ponoragan	Panjang Semenisasi	Desa Ponoragan	80 m	200.000.000	APBD	0	0
12	Lanjutan Semenisasi Jl. Pramono Desa Ponoragan	Panjang Semenisasi	Desa Ponoragan	100 m	200.000.000	APBD	0	0
	Pembuatan Bdan Jalan RT. 015 Desa Jonggon Desa	Panjang jalan yang di bangun	Desa Jonggon	100 m	200.000.000	APBD	0	0

13								
14	Pembuatan Badan Jalan RT. 07 Desa Jonggon Desa	Panjang jalan yang di bangun	Desa Jonggon	100 m	200.000.000	APBD	0	0
15	Pembuatan Box Culvert Jl. Bayangkara Desa Loa Kulu Kota	Jumlah Box Culvert	Desa Loa Kulu Kota	5 Unit	200.000.000	APBD	0	0
16	Perawatan Taman Kecamatan Loa Kulu	Luas Taman yang mendapat Perawatan	Desa Loa Kulu Kota	100 m2	200.000.000	APBD	0	0
17	Festival Loa Kulu Mengingat	Jumlah kegiatan Festival di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	Desa Loa Kulu Kota	1 Kegiatan	200.000.000	APBD	0	0
18	Semenisasi Jalan Depan Pasar Loa Kulu	Panjang Semenisasi	Desa Loa Kulu Kota	100 m	200.000.000	APBD	0	0
19	Normalisasi Parit Besar RT. 09 Loh Sumber	Panjang Parit	Desa Loh Sumber	100 m	200.000.000	APBD	0	0
20	pembuatan badan jalan rt 8 desa sumber sari	Panjang jalan yang di bangun	Desa Sumber Sari	100 m	200.000.000	APBD	0	0
21	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Loa Kulu Kota	Jumlah Unit LPJU	Desa Loa Kulu Kota	10 Unit	200.000.000	APBD	0	0
22	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Jembayan Dalam	Jumlah Unit LPJU	Desa Jembayan Dalam	10 Unit	200.000.000	APBD	0	0
23	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Jembayan Tengah	Jumlah Unit LPJU	Desa Jembayan Tengah	10 Unit	200.000.000	APBD	0	0

					5.000.000.000			
1	Pembuatan Parit RT. 07 Ponoragan	Panjang Parit	Desa Ponoragan	70 m	175.000.000	APBD	0	0
2	Pembuatan Parit RT. 06Ponoragan	Panjang Parit	Desa Ponoragan	70 m	175.000.000	APBD	0	0
3	Pembuatan Parit RT. 07 DesaJonggon	Panjang Parit	Desa Jonggon	70 m	175.000.000	APBD	0	0
4	Pembuatan Parit RT. 04 DesaJonggon	Panjang Parit	Desa Jonggon	70 m	175.000.000	APBD	0	0
5	Pembuatan WC Umum LebolaisJembayan Dalam	Jumlah Unit WC	Desa Jembayan Dalam	2 Unit	175.000.000	APBD	0	0
6	PembuatanTPA Rt 06 Lebolais Jembayan Dalam	Jumlah Bangunan TPA	Desa Jembayan Dalam	1 Unit	175.000.000	APBD	0	0
7	Semenisasi Gang Jumat Rt 07Lebolais Jembayan Dalam	Panjang Jalan yang diSemenisasi	Desa Jembayan Dalam	70 m	175.000.000	APBD	0	0
8	Semenisasi Gang Bambu Rt 09Jembayan Dalam	Panjang Jalan yang diSemenisasi	Desa Jembayan Dalam	70 m	175.000.000	APBD	0	0
9	Pembuatan Parit Beton Gg. JaheJembayan Tengah	Panjang Parit	Desa Jembayan Tengah	70 m	175.000.000	APBD	0	0
10	Pembangunan Saluran DrainaseRT. 02 Jembayan Tengah	Panjang Drainase yangdibangun	Desa Jembayan Tengah	70 m	175.000.000	APBD	0	0
11	Pengurukan Gg. Abadi RT. 03Jembayan	Panjang Urukan	Desa Jembayan	80 m	175.000.000	APBD	0	0
12	Pengurukan Gg. Maman RT. 01Jembayan	Panjang Urukan	Desa Jembayan	80 m	175.000.000	APBD	0	0
13	Semenisasi Gang Setia Kawan Rt23 Jembayan	Panjang Jalan yang diSemenisasi	Desa Jembayan	70 m	175.000.000	APBD	0	0
14	Peningkatan gang Famili Rt 19Jembayan	Panjang jalan yang di bangun	Desa Jembayan	80 m	175.000.000	APBD	0	0
15	Penurapan Gang Sumber Sari Rt23 Jembayan	Panjang Turap yang dibangun	Desa Jembayan	90 m	175.000.000	APBD	0	0
16	Turap Sisi Jalan Loa Gagak DesaLoa Kulu Kota	Panjang Turap yang dibangun	Desa Loh Sumber	90 m	175.000.000	APBD	0	0
17	Lanjutan parit Gg. Lobang SumurDesa Loh Sumber	Panjang Drainase yangdibangun	Desa Loh Sumber	70 m	175.000.000	APBD	0	0
18	Lanjutan Parit Depan PondokPesantren Desa Loh Sumber	Panjang Drainase yangdibangun	Desa Loh Sumber	70 m	175.000.000	APBD	0	0
19	Pengurukan Gg. Shaumil RT. 02Ponoragan	Panjang Urukan	Desa Ponoragan	70 m	185.000.000	APBD	0	0

20	Semenisasi RT. 02 Gg. KatirinPonoragan	Panjang Jalan yang diSemenisasi	Desa Ponoragan	70 m	185.000.000	APBD	0	0

21	Semenisasi Jalan Isnaini Desa Sepakat	Panjang Jalan yang di Semenisasi	Desa Sepakat	70 m	185.000.000	APBD	0	0
22	Pengurukan Gg. Rawa Manggis Jongkang	Panjang Urukan	Desa Jongkang	70 m	185.000.000	APBD	0	0
23	Pengurukan Jalan Jetty Jongkang	Panjang Urukan	Desa Jongkang	70 m	185.000.000	APBD	0	0
24	Pembangunan Parit Jalan Melati margahayu	Panjang Drainase yang dibangun	Desa Margahayu	70 m	185.000.000	APBD	0	0
25	Pembuatan Parit Beton Jalan Semangka margahayu	Panjang Drainase yang dibangun	Desa Margahayu	70 m	185.000.000	APBD	0	0
26	Semenisasi RT. 14 Desa Jonggon	Panjang Jalan yang di Semenisasi	Desa Jonggon	70 m	185.000.000	APBD	0	0
27	Pembuatan Parit Jl. Subali Desa Jonggon Jaya	Panjang Drainase yang dibangun	Desa Jonggon Jaya	70 m	185.000.000	APBD	0	0
28	Semenisasi RT. 21 Loa Gagak	Panjang Urukan	Desa Loa Kulu Kota	70 m	185.000.000	APBD	0	0

Lampiran I
Berita acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Kecamatan
Nomor :
Tanggal :
Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah Kecamata Loa Kulu Tahun : 2024

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yangdiusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (titik koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN, danCSR)	Link Upload Dokumen Pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/Pengampu
1	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Belum adanya penyelesaian	KecamatanLoa Kulu	Lanjutan Pembangunan Kantor Camat Loa Kulu	1 Paket	Rp 50.000.000.000,00		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
2	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Belum adanya penyelesaian	KecamatanLoa Kulu	Lanjutan Pembangunan Taman Literasi Kecamatan Loa Kulu	1 Paket	Rp 5.000.000.000,00		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
3	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Jembatan yangada tidak layak	Desa Sungai Payang	Pembangunan Jembatan Sentuk Desa Sungai Payang	1 Paket	Rp 15.000.000.000,00		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
4	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Jalan sudah mengalami korosi dan berlubang	Desa Loa Kulu Kota	Semenisasi Jalan Samping Polsek Loa Kulu	1 Paket	Rp 2.000.000.000,00		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
5	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		struktur jalan yang ada dr tanah dan batu	Desa Sepakat	PeningkatanJalan Rapak Nyamuk DesaSepakat 3 Km	3 Km	Rp 5.000.000.000,00		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum

6	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Jalan semenisasi mengalami korosi dan berlubang	Desa Lung Anai	Pengaspalan jalan di dalam lingkungan Desa	L. 4 m x P. 2000 m	2.000.000.000	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
7	Pengembang an Kawasan Wisata di Pedesaan/K ecamatan	Bangunan yg ada sdh terlalu tua	Desa Lung Anai	Pembangunan LAmin Adat yang baru	L. 40 m x P. 60 m	5.000.000.000	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
8	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Bangunan lama tidak layak dan perlu pemindahan	Desa Lung Anai	Pembangunan Kantor Desa yang Baru	L. 25 m x P. 30 m	2.000.000.000	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
9	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Penyiapan Lkasi baru Kantor Desa	Desa Lung Anai	Penimbunan Tanah Kas Desa	L. 100 m x P. 100 m	1.000.000.000	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
10	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Belum Ada Gedung Olah Raga	Desa Lung Anai	Pembangunan Gedung Badminton yang baru	L . 25 m x P. 25 m	3.000.000.000	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
11	Pengembang an Kawasan Wisata di Pedesaan/K ecamatan	Perlu Bangunan gerbang adat	Desa Lung Anai	Pembangunan Pintu Gerbang Adat	L. 6 m x T. 6 m	1.000.000.000	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
12	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Perlu penurapan	Desa Lung Anai	Penurapan Tanah Kas Desa	L. 100 m x P. 100 m	1.000.000.000	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum

13	Pengembang an Kawasan Wisata di Pedesaan/K ecamatan	Perlu pembangunan baru	Desa Lung Anai	Pembangunan Amin Daduq Yang Baru	L. 30 m x P. 40 m	Rp. 500.000.000	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
14	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	BPU belum terselesaikan	RT.01 Desa Jembayan Dalam	Lanjutan pembuatan gedung BPU Desa	12 x 20	Rp1.000.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
15	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	jalan belum tersemen	RT.04 Desa Jembayan Dalam	Semenisasi jalan Rukun Makmur	4 x 2000	Rp800.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
16	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	struktur jalan yang ada dr tanah dan batu	RT. 10, 05, 9 Tudungan Desa Jembayan Tengah	Lanjutan Semenisasi Jalan Tudungan	5 x 4000 meter	Rp 4.500.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
17	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	struktur jalan yang ada dr tanah dan batu	RT. 06 Tudungan Desa Jembayan Tengah	Lanjutan Semenisasi Jalan Tudungan Ulu	4 x 1000 meter	Rp 3.000.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
18	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	terjadi longsoran di sisi jalan	RT. 03, 04 Dusun I Desa Jembayan Tengah	Pemasangan Bronjongan Jalan Runtuh	300 meter	Rp 2.000.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan umum
19	Pengembang an Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/K ecamatan	terdapat longsoran di sisi kuburan	RT. 06 Tudungan Desa Jembayan Tengah	Turap Beton Kuburan Tudungan RT. 006	1 Paket	Rp 500.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas pekerjaan umum

20	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	belum terdapatnya pagar	RT. 08 Lempatan Baru Desa Jembayan Tengah	Pagar Beton Kuburan Lempatan Baru	1 Paket	Rp 500.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas pekerjaan umum
21	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	jalan masih struktur tanah dan berbatu	RT.013 Rempanga Desa Sungai Payang	Lanjutan Semenisasi Jalan	± 1,5 km	Rp750.000.000	APBD	Disepakati	Dinas pekerjaan umum
22	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	struktur jalan masih tanah dan batu	Jembayan	Semenisasi Jalan menuju Dusun Ukung	5 x 5000 m	10.000.000.000	APBD	Disepakati	Dinas pekerjaan umum
23	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT.15 Desa Loa Kulu Kota	Semenisasi Jl. Padat Karya	3x1000 m	2.000.000.000	APBD	Disepakati	Dinas pekerjaan umum
24	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT.02 - RT.03 - RT.04 - RT.05 Desa Sumber Sari	PENINGKATAN JALAN AMAT KHASIM	± 3 Km	Rp 3.000.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas pekerjaan Umum
25	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT.06 Desa Sumber Sari	PENINGKATAN JALAN KEDONDONG	± 1 Km	Rp 1.000.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas pekerjaan Umum
26	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT.07 Desa Sumber Sari	PENINGKATAN JALAN NANAS	± 1.5 Km	Rp 1.500.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas pekerjaan Umum

27	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT.10 Desa Sumber Sari	PENINGKATAN JALAN TAMAN ARUM MENUJU DESA PONORAGAN	± 1 Km	Rp 1.000.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas pekerjaan Umum
28	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT.01 - RT.02 - RT.06 - RT.07 - RT.08 - RT.11 - RT.09 Desa Sumber Sari	PENINGKATAN JALAN POROS DESA SUMBER SARI (JL.R.ISMANUN/ BANGUN SARI/ TAMAN ARUM)	± 4.5 Km	Rp 4.500.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas pekerjaan Umum
29	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Belum adanya jalan yang memadai	RT.02 - RT.04 Desa Sumber Sari	PEMBUATAN BADAN JALAN RT.02 MENUJU RT.04	± 1.5 Km	Rp 1.500.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas pekerjaan Umum
30	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 04,06,07 Desa Ponoragan	Peningkatan Jalan manunggal Desa Ponoragan	5 Km	Rp 5.000.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
31	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 05 Desa Ponoragan	Pengaspalan Jalan Sidodadi RT 05 Desa Ponoragan	3 Km	Rp 3.000.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
32	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Belum tersedianya jembatan yang layak	RT 02 Desa Ponoragan	Pembuatan Jembatan Jl. Pramono RT 02 Desa Ponoragan	1 Paket	Rp 700.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum

33	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 02 Desa Ponoragan	Semenisasi Jl. Pramono RT 02 Desa Ponoragan	3 Km	Rp 3.000.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
34	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 05 Desa Ponoragan	Semenisasi Jalan Tembus RT 05 Menuju RT 01 / Jalan kuburan	1 Km	Rp 1.000.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
35	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 06 Desa Ponoragan	PENINGKATAN JALAN PERTANIAN DAN JALAN ILALANG RT 06 DESA PONORAGAN	1 Km	Rp 1.000.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
36	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 06 Desa Ponoragan	SEMENISASI JL. RAPAK PANJANG RT 06 DESA PONORAGAN	1 Km	Rp 1.000.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
37	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 06 Desa Ponoragan	SEMENISASI JL. ULIN RT 06 DESA PONORAGAN	1 Km	Rp 1.000.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
38	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	posisi jalan masih terlalu rendah dan berair	Jalan ahmad yani RT 04 Desa Sepakat	Pengurukan dilahan galangan kapal	200m x 50m	Rp. 2.000.000.000	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
39	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 002 Desa Jongkang	Semenisasi Jalan "Gang Mansur - Gang Udin"	=0,30m x 5m x 318m	Rp 715.500.000,00	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum

40	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 01-RT 02 Desa Jonggon Jaya	PENINGKATAN JALAN PASUNDAN	1300 m	Rp. 3.000.000.000	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
41	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 11-12 Desa Jonggon Jaya	PENINGKATAN JALAN POROS I	1300 m	Rp. 8.000.000.000	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
42	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 14 Desa Jonggon Jaya	PENINGKATAN JALAN MARGO MULYO	600 m	Rp. 800.000.000	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
43	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 15 Desa Jonggon Jaya	JALAN AYAM POTONG (Pak Dedi)	500 m	Rp. 800.000.000	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
44	Pengembang an Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/K ecamatan	Kondisi jalan rawan longsor	RT 09 Desa Jonggon Jaya	PEMBUATAN TURAP BETON JALAN KUBURAN	60 m	Rp. 800.000.000	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
45	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT. 001 Desa Jonggon	lanjutan semenisasi jalan poros utama desa	3 km	Rp 15.000.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
46	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT. 010 Desa Jonggon	semenisasi jalan poros utama desa	5 Km	Rp 25.000.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum

47	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT. 014 Desa Jonggon	semenisasi jalan poros utama desa	1 Km	Rp 5.000.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
48	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Belum tersedianya jembatan yang layak	RT. 001 Desa Jonggon	Pembangunan Jembatan Beton	1 Unit	Rp 15.000.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
49	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Belum tersedianya jembatan yang layak	RT. 002 Desa Jonggon	Pembangunan Jembatan Beton	1 Unit	Rp 15.000.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
50	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Bangunan yang ada kurang layak	RT. 001 Desa Jonggon	Pembangunan Kantor Desa	1 Unit	Rp 1.000.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
51	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Belum adanya bangunan BPU Jonggon C	RT. 002 Desa Jonggon	Pembangunan BPU Jonggon C	1 Unit	Rp 500.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
52	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 03 Desa Jonggon Jaya	PENINGKATAN JALAN TANTAI INDAH	1500 m	Rp. 1.500.000.000	APBD	Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
53	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Belum adanya gedung Pusban	RT. 004 Desa Jonggon	Pembangunan Gedung Pusban	1 Unit	Rp 1.000.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas Kesehatan

54	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Belum adanya ruang terbuka hijau	Kecamatan Loa Kulu	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Loa Kulu	1 PAKET	Rp 3.000.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
55	Pengembang an Kawasan Wisata di Pedesaan/K ecamatan	Perlu Peremajaan Alat Seni	Desa Lung Anai	Pengadaan Kelengkapan Seni Budaya	1 Kegiatan	100.000.000	APBD	Disepakati	Dinas Pariwisata
56	Pengembang an Kawasan Wisata di Pedesaan/K ecamatan	Perlu Pendampingan	Desa Lung Anai	Pembinaan Pelatihan Seni Tari Tradisional	1 Kegiatan	Rp. 30.000.000	APBD	Disepakati	Dinas Pariwisata
57	Pengembang an Kawasan Wisata di Pedesaan/K ecamatan	Perlu Pendampingan	Desa Lung Anai	Pembinaan dan Pelatihan Musik Tradisional	1 Kegiatan	Rp. 50.000.000	APBD	Disepakati	Dinas Pariwisata
58	Pengembang an Kawasan Wisata di Pedesaan/K ecamatan	Pelestarian seni budaya Loa Kulu	Kecamatan Loa Kulu	Festival Loa Kulu Mengingat		Rp 500.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas Pariwisata
59	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	kondisi lahan yang ada masih berupa lahan basah	RT. 03 Selingsing Desa Jembayan Tengah	Lanjutan Pengurukan Lahan SMP	35000 m3	Rp 875.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas Pendidikan
60	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Belum adanya gedung SMP	RT. 001 Desa Jonggon	Pembangunan Gedung SMPN	1 Unit	Rp 1.000.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas Pendidikan

61	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Belum adanya LPJU	Jonggon Desa	Penerangan Jalan Lingkungan	180 Titik	Rp 15.000.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas Perhubunga n
62	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Perlu bangunan sarana air bersih	Desa Lung Anai	Pembuatan/ Pembangunan Sarana dan prasarana Air Bersih	1 Kegiatan	Rp. 300.000.000	APBD	Disepakati	Dinas Perkim
63	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Belum adanya sarana air bersih	Desa Jonggon	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Jonggon	1 Paket	Rp 5.000.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas Perkim
64	Pengembang an Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/K ecamatan	Belum ada parit pasangan	RT 01 Desa Ponoragan	Rehab Parit Jalan Harjo Sumarto Desa Ponoragan	1 Km	Rp 1.000.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas Perkim
65	Pengembang an Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/K ecamatan	Belum ada parit pasangan	RT 07 Desa Ponoragan	Pembuatan Parit Pasangan RT 07 Desa Ponoragan	1 Km	Rp 1.000.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas Perkim
66	Pengembang an Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/K ecamatan	Belum ada parit pasangan	RT 06 Desa Ponoragan	Pembuatan Parit Pasangan RT 06 Desa Ponoragan	2 Km	Rp 1.000.000.000,00	APBD	Disepakati	Dinas Perkim

67	Pengembang an Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/K ecamatan	Belum ada parit pasangan	RT 07 Desa Ponoragan	Pembuatan Parit Pasangan Teluk bayur RT 07 Desa Ponoragan	1 Km	Rp 1.000.000.00 0,00	APBD	Disepakati	Dinas Perkim
68	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 004 Desa Jongkang	Semenisasi Jalan "Swadaya Etam"	= 4m x 300m x 0,30m	Rp 540.000.000, 00	APBD	Disepakati	Dinas Perkim
69	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 005 Desa Jongkang	(Lanjutan) Pelebaran Semenisasi Jalan "Husein"	=2,5m x 800m x 0,30m	Rp 900.000.000, 00	APBD	Disepakati	Dinas Perkim
70	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 007 Desa Jongkang	Semenisasi Jalan "Beringin Jaya"	= 5m x 670m x 0,30m	Rp 1.507.500.00 0,00	APBD	Disepakati	Dinas Perkim
71	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Struktur jalan masih tanah dan berbatu	Rt. 007 Dusun Kebunsari Desa Margahayu	Lanjutan Semenisasi Jalan Poros II RT. 007	300 Meter	Rp 500.000.000, 00	APBD	Disepakati	Dinas Perkim
72	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 07 Desa Jonggon Jaya	PENINGKATAN JALAN BRONTOSENO	300 m	Rp. 650.000.000	APBD	Disepakati	Dinas Perkim
73	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 08 Desa Jonggon Jaya	PENINGKATAN JALAN HANOMAN	1.100 m	Rp. 1.000.000.00 0	APBD	Disepakati	Dinas Perkim

74	Pengembang an Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/K ecamatan	Belum ada parit pasangan	RT. 004 Desa Jonggon	Pembuatan Parit Beton	1Km	Rp 12.000.000.0 00,00	APBD	Disepakati	Dinas Perkim
75	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	lahan yang ada masih rendah dan sering terdampak banjir	RT. 11 Lempatan Baru Desa Jembayan Tengah	Pengurukan Lapangan Bola	1 Paket	Rp 1.000.000.00 0,00	APBD	Disepakati	Dispora
76	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah	belum tersedianya lapangan volley	RT.014 Desa Sungai Payang	Pembangunan Lapangan Volly	1 PAKET	Rp150.000.0 00	APBD	Disepakati	Dispora

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Akhir SKPD Tahun 2024 Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana strategis Kecamatan Loa Kulu Tahun 2022-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun. Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Loa Kulu.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Akhir SKPD Tahun 2024 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2024. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Loa Kulu.

Demikian pula dengan tersusunnya Rancangan Rencana Kerja Akhir SKPD Tahun 2024 Kecamatan Loa Kulu ini juga masih terdapat kekurang-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya, Penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

qq.RENJA KECAMATAN LOA JANAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan ayat (2) pasal (2) dengan jenjang perencanan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/Kota) harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)

Sementara itu paralel dengan pembuatan RKP daerah, sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Renja Perangkat daerah,yang di susun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat daerah sebagaimana di maksud dirumuskan kedalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) dan mengacu kepada RKPD, yang memuat program, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Kecamatan Loa Janan Tahun 2023 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu, b) Rumusan status kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini, c) Rumusan peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan Renja, d) Rumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan, e) pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana, f) rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja, g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan, h) prakiraan

maju pendanaan untuk tahun berikutnya, i) kejelasan siapa yang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran. Melalu pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan kerangka berfikir yang komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.

Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan melalui a) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, b) kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur Pemerintah dan non pemerintah, c) keterwakilan yang mewadai dari seluruh segmen masyarakat terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal, d) berperan aktif pada pelaksanaan musrenbang RKPD dari segi penerapan perencanaan partisipatif, e) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan serta prioritas program.

Pendekatan politis, penyusunan Renja Kecamatan Loa Janan mengacu pada RKPD dan RPJMD yang merupakan bentuk konsekuensi politis antara Bupati/Wakil Bupati terpilih. Pendekatan ini juga tercermin pada keterlibatan aktif DPRD dalam musrenbang Kecamatan dan kabupaten termasuk hasil sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD, kemudian dokumen RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan sampai RAPBD.

Pendekatan top down, perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui rapat koordinasi dan musrenbang mulai tingkat nasional, provinsi dan kabupaten juga tujuan *globalMDGs.* Pendekatan ini tercermin pada

a) sinergi dengan program prioritas nasionaldan daerah, b) konsisten pada RPJMD, RKPD dan Renstra Kecamatan Loa Janan, Konsisten dengan dokumen RTRW daerah, c) penanganan masalah dengan pendekatan holistic dan pendekatan sistem.

Pendekatan *bottom-up,* perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dan diselaraskan melalui musrenbang, konsisten terhadap visi misi RPJMD serta kesepakatan masyarakat tentang prioritas pembangunan dan hasil forum SKPD.

Penyusunan Renja ini disesuaikan dengan Permendagri 54 Tahun

2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja ini memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kecamatan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9 Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10 Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

14 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

15 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

16 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

   Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Loa Janan selama tahun 2023 dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD dan Renstra Kecamatan.

2. Tujuan :

   Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah

1.4 Sistematika Penulisan.

Pada dasarnya rencana kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Loa Janan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penulisan Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daeah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Program dan Kegiatan
BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa oleh KLJ adalah pengkuruan dalam bentuk indeks berskala 1 s.d 10 yang merupakan rata-rata kumulatif capaian indikator pada 10 (Sepuluh) sasaran strategis pada persepektif pemangku kepentingan. Semakin tinggi nilai tingkat keberhasilan, menunjukkan bahwa semakin baik kinerja KLJ secara keseluruhan perspektif pemangku kepentingan.

Adapun capaian atas Indikator Keberhasilan atau IKU (Indikator Kinerja Utama) ini pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET				
				2022	2023	2025	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	75	85	85	85	85
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	75	85	85	85	85
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	70	70	70	70	70
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	65	65	65	65	65

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program/kegiatan, dikarenakan ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi serta perencanaan penganggaran biaya yang belum sesuai kebutuhan Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra KLJ tidak efektif dan efisiennya penggunaan anggaran

dikarenakan perencanaan dan penganggaran yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi KLJ mengakibatkan tujuan dan sasaran tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya

Untuk tahun berikutnya perencanaan dan penganggaran yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan ril Kecamatan Loa Janan dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, diperlukan komitmen pimpinan dalam mengarahkan tim penyusunan program dan kegiatan.

Berdasarkan Laporan Kinerja KLJ Tahun 2023 diatas, berikut disampaikan realisasi pelaksanaan renja tahun 2021, tabel 2.1

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja KLJ dan Pencapaian Renstra KLJ Tahun 2023
Kabupaten Kutai Kartanegara

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2021			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENJA TAHUN BERJALAN (2021)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA S/D TAHUN 2021	
			TARGET RENJA 2021	REALISASI RENJA 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3						
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Cakupan Layanan Adminitrasi Perkantoran**	**100%**						
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Penyediaan Telekomunikasi, Air,Listrik dan Internet	36 Rekening	36 Rekening	36 Rekening	100	36 Rekening	36 Rekening	100
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan Kantor	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100	2 Jenis	2 Jenis	100
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diberi pemeliharaan dan perizinan	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100	7 Unit	7 Unit	100
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan	70 Jenis	70 Jenis	70 Jenis	100	70 Jenis	70 Jenis	100
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan	35000 Lembar	35000 Lembar	35000 Lembar	100	35000 Lembar	35000 Lembar	100
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100	7 Jenis	7 Jenis	100
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	30 jenis	30 jenis	30 jenis	100	30 jenis	30 jenis	100
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	700 Porsi Makanan Snack dan Minuman	700 Porsi Makanan Snack dan Minuman	700 Porsi Makanan Snack dan Minuman	100	700 Porsi Makanan Snack dan Minuman	700 Porsi Makanan Snack dan Minuman	100
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	250 Orang/Hari	250 Orang/Hari	250 Orang/Hari	100	250 Orang/Hari	250 Orang/Hari	100
Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung non PNS	288 Orang/Bulan	288 Orang/Bulan	288 Orang/Bulan	100	288 Orang/Bulan	288 Orang/Bulan	100
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja Yang diperbaiki	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100	7 Unit	7 Unit	100
Penataan Arsip Perangkat Daerah					100			100
Pembangunan Diorama dan Pojok Baca	Jumlah Dokumen Arsip, Jumlah Fasilitas Pendukung Penataan Arsip	1000 Dokumen, 5 Unit	1000 Dokumen, 5 Unit	1000 Dokumen, 5 Unit	100	1000 Dokumen, 5 Unit	1000 Dokumen, 5 Unit	100
Pengelolaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Arsip, Jumlah Fasilitas Pendukung Penataan Arsip	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	15 Buah	15 Buah	15 Buah	100	15 Buah	15 Buah	100

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran**	**100%**						
Pengadaan peralatan gedung								
Pengadaan Perlengkapan Kantor Camat	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	2 Paket	100
Pengadaan/Instalasi Soudsystem BPU Kecamatan	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	2 Paket	100
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor								
Rehab Ringan Mushola As Syaukani Kantor Camat	Jumlah Gedung Kantor yang diberi pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
Lanjutan Rehab Ringan/Berat Gedung BPU	Jumlah Gedung Kantor yang diberi pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
Lanjutan Pembangunan Jembatan Penghubung Kantor camat dan BPU	Jumlah Gedung Kantor yang diberi pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Opreasional	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100	4 Unit	4 Unit	100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**rata-rata Nilai SKP Seluruh ASN Perangkat**	**100%**						
Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Inovasi**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	100	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	100

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**1. Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja; 2. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset; 3. Persentase tindak lanjut temuan audit**	**100%**						
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev								
Pembangunan Pusat Data dan Pengelolaan Data	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Monitoring dan Evaluasi APBDes	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Penyusunan pelaporan keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100
Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah;Jumlah Laporan Barang Milik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Program Pembangunan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan	**Cakupan Sarana dan Prasarana Umum dalam Kondisi Baik**							
Pembangunan Gapura Selamat Datang Desa Loa Janan Ulu	Jumlah Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
Pembangunan Balai Pajang Produk UKM Kecamatan Loa Janan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100	5 Unit	5 Unit	100

Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan	**1. Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik; 2. Cakupan Jembatan dalam Kondisi baik**	**80%**						
Kegiatan Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Kecamatan	Panjang Jalan Yang dibangun							
Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkar	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Semenisasi Jalan RT. 14 Dusun Batuah Desa Batuah	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Semenisasi Jalan RT. 6 Dusun Tani Maju Desa Batuah	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Semenisasi Jalan Melati Desa Bakungan	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Semenisasi Jalan RT. 1 Dusun Tani Maju Desa Batuah	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Semenisasi Jalan Sampai Hati RT. 13 DesaTani Bhakti	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Semenisasi Jalan Kuburan Kristen RT. 8 Desa Loa Duri Ulu	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Semenisasi Jalan Datar Asam 6 RT. 26 Desa Loa Janan Ilir	Panjang Jalan	75 Meter	75 Meter	75 Meter	100	75 Meter	75 Meter	100
Semenisasi Jalan Samping Masjid Al-Hidayah Dusun Batuah Desa Batuah	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Semenisasi Gg. Borneo RT.	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Semenisasi GG.Arapah	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Pemeliharan Badan Jalan RT. 16 Menuju RT. 18 Desa Batuah	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Semenisasi RT. 5 Desa Loa Janan Ulu	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Semenisasi Jalan RT. 31 Desa Loa Janan Ulu	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100

Semenisasi Gang Indasa RT. 24 Dusun Tegal Anyar Desa Loa Janan Ulu	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Peningkatan Jalan Berkah (Jalan Menuju Kuburan)	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Semenisasi Jalan Sumur RT. 3	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Semenisasi Gang Haji Kai Bain RT. 3 Dusun I Desa Loa Duri Ilir	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Semenisasi dan pengurukan RT.25 Desa Loa Janan Ulu	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Semenisasi Jalan Pondok Pesantren Ar-Rasyidi RT. 17 Dusun 6 Jalan Swadaya	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Semenisasi Jalan Sekumpul RT. 03	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Semenisasi dan Peningkatan Badan Jalan Padaringan 800M x 3,10M x 0,15M Dusun Mekar Jaya RT. 02	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Semenisasi Gang Sadulur 270M x 2,50M x 0,15M RT. 4 Dusun Warga Tunggal	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Semenisasi Gang Sabatur 300M x 2,50M x 0,15 RT. 5 Dusun Warga Tunggal	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Peningkatan / Semenisasi Badan Jalan Perjuangan 1 Loa Duri Ulu	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Peningkatan Semenisasi Gang Manda RT. 10 Loa Duri Ulu	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Lanjutan Semenisasi RT. 13 Dusun Beringin Jaya	Panjang Jalan	75 Meter	75 Meter	75 Meter	100	75 Meter	75 Meter	100
Semenisasi Jalan Poros RT. 1 Tani Maju	Panjang Jalan	90 Meter	90 Meter	90 Meter	100	90 Meter	90 Meter	100

Pembangunan Jembatan Beton Kali Banter	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Lanjutan Pematangan Lahan Jalan Tembus Loa Ranten Ke Dusun Tegal Anyar	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Semenisasi Jalan Datar Asam RT. 26	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Lanjutan Penurapan Jalan Ex. PT. Hima Desa Loa Duri Ilir	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Peningkatan / Semenisasi Badan Jalan Poros Masaping	Panjang Jalan	75 Meter	75 Meter	75 Meter	100	75 Meter	75 Meter	100
Peningkatan / Badan Jalan Pelangi H. Yuslit Ke Jalan Air Terjun RT. 10	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Peningkatan Jalan Gang Tayib RT. 36 Desa Loa Janan Ulu	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Lanjutan Semenisasi Jl. Kemuning RT. 6 Desa Bakungan	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Semenisasi jalan Pertanian Girang	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Peningkatan Badan Jalan RT. 45 Tani Maju	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Pengerasan Jalan Poros Desa Tani Harapan Menuju Bantuas Muara Jawa	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Cinta Ratu	Panjang Jalan	100 Meter	100 Meter	100 Meter	100	100 Meter	100 Meter	100
Peningkatan Jalan Gg Semar Rt.02	Panjang Jalan	90 Meter	90 Meter	90 Meter	100	90 Meter	90 Meter	100

Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan	Panjang Drainase yang Dibangun	Meter	Meter	Meter		Meter	Meter	
Pembuatan Parit RT. 4 Dusun Tani Maju Desa Batuah	Panjang Drainase yang Dibangun	200 Meter	200 Meter	200 Meter	100	200 Meter	200 Meter	100
Pembuatan Parit SDN 014 Loa Janan	Panjang Drainase yang Dibangun	175 Meter	175 Meter	175 Meter	100	175 Meter	175 Meter	100
Pembuatan Parit Jalan Kabupaten RT. 3 Desa Tani Harapan	Panjang Drainase yang Dibangun	200 Meter	200 Meter	200 Meter	100	200 Meter	200 Meter	100
Pembuatan Parit di Dusun Putak	Panjang Drainase yang Dibangun	200 Meter	200 Meter	200 Meter	100	200 Meter	200 Meter	100
Lanjutan Pembuatan Parit Dusun Gintung	Panjang Drainase yang Dibangun	200 Meter	200 Meter	200 Meter	100	200 Meter	200 Meter	100
Pembuatan Parit Gg. Cempaka 3	Panjang Drainase yang Dibangun	200 Meter	200 Meter	200 Meter	100	200 Meter	200 Meter	100
Pembuatan Parit Gg. Damai	Panjang Drainase yang Dibangun	200 Meter	200 Meter	200 Meter	100	200 Meter	200 Meter	100
Pembuatan Parit (Drainase) Jalan Tanjung Sari RT. 24	Panjang Drainase yang Dibangun	200 Meter	200 Meter	200 Meter	100	200 Meter	200 Meter	100
Pembuatan Parit (Drainase) Jalan Adonara Desa Loa Janan Ulu	Panjang Drainase yang Dibangun	200 Meter	200 Meter	200 Meter	100	200 Meter	200 Meter	100
Turap Parit Kuburan Muslim RT. 25 Dusun 4 Desa Loa Duri Ilir	Panjang Drainase yang Dibangun	175 Meter	175 Meter	175 Meter	100	175 Meter	175 Meter	100
Pembangunan parit jalan Pelita RT.13 Desa Purwajaya	Panjang Drainase yang Dibangun	200 Meter	200 Meter	200 Meter	100	200 Meter	200 Meter	100
Pembuatan Parit Jalan Swadaya RT. 17 dan RT. 20 Jahuq	Panjang Drainase yang Dibangun	200 Meter	200 Meter	200 Meter	100	200 Meter	200 Meter	100
Pembangunan Parit Kanan Jalan Dusun Sari Mulya B RT. 13	Panjang Drainase yang Dibangun	200 Meter	200 Meter	200 Meter	100	200 Meter	200 Meter	100
Pembuatan Parit Sarimun	Panjang Drainase yang Dibangun	200 Meter	200 Meter	200 Meter	100	200 Meter	200 Meter	100
Pembuatan parit Di RT. 23 Desa Loa Duri ilir Kec. Loa Janan	Panjang Drainase yang Dibangun	200 Meter	200 Meter	200 Meter	100	200 Meter	200 Meter	100

Pembuatan Parit badan Jalan Poros Putak Bugis	Panjang Drainase yang Dibangun	200 Meter	200 Meter	200 Meter	100	200 Meter	200 Meter	100
Pembuatan Parit Gg. Damai Desa Loa Duri Ulu	Panjang Drainase yang Dibangun	200 Meter	200 Meter	200 Meter	100	200 Meter	200 Meter	100
Pembuatan Parit Jalan Sriwarga RT. 17 Desa Loa Duri Ulu	Panjang Drainase yang Dibangun	200 Meter	200 Meter	200 Meter	100	200 Meter	200 Meter	100
Pembuatan Parit Jalan Poros	Panjang Drainase yang Dibangun	200 Meter	200 Meter	200 Meter	100	200 Meter	200 Meter	100
Pembangunan Parit (Drainase) Jalan Dusun Warga Mulya	Panjang Drainase yang Dibangun	200 Meter	200 Meter	200 Meter	100	200 Meter	200 Meter	100
Pembangunan Saluran Gorong-gorong Kecamatan	Jumlah Gorong-gorong yang dibangun	Jumlah Unit						
Pembuatan Gorong (Box Culvert) Jalan Pandai Besi RT. 32	Jumlah Gorong-gorong yang dibangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
Pembangunan Turap Kecamatan	Cakupan Pembanguan Turap	Meter						
Pembangunan Turap Jalan Pergantian RT. 24 Dusun Tegal Anyar Desa Loa Janan Ulu	Panjang Turap	150 Meter	150 Meter	150 Meter	100	150 Meter	150 Meter	100
Pembuatan Turap di Dusun Karya Makmur	Panjang Turap	150 Meter	150 Meter	150 Meter	100	150 Meter	150 Meter	100
Turap Jalan Pertanian Menuju Purwajaya Desa Loa Janan Ulu	Panjang Turap	150 Meter	150 Meter	150 Meter	100	150 Meter	150 Meter	100
Lanjutan Pembangunan Turap Jalan RT. 6	Panjang Turap	150 Meter	150 Meter	150 Meter	100	150 Meter	150 Meter	100
Turap Jalan RT. 2 Dusun Harapan Sejahtera	Panjang Turap	150 Meter	150 Meter	150 Meter	100	150 Meter	150 Meter	100
Penurapan Jalan Pembangunan RT. 01 Dusun Mekar Jaya	Panjang Turap	150 Meter	150 Meter	150 Meter	100	150 Meter	150 Meter	100
Penurapan Jalan Lingkungan Desa Tani Bhakti	Panjang Turap	150 Meter	150 Meter	150 Meter	100	150 Meter	150 Meter	100

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	**Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perijinan dan non perijinan**	**65%**						
Fasilitasi Paten	Jumlah Ijin/Surat Keterangan yang diterbitkan	3000 Surat	3000 Surat	3000 Surat	100	3000 Surat	3000 Surat	100
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kecamatan	**Tingkat Partsipasi Masyarakat**	**95%**						
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Peserta	85 Orang	85 Orang	85 Orang	100	85 Orang	85 Orang	100
Fasilitasi MTQ	Jumlah Peserta MTQ	62 Orang	62 Orang	0 Orang	0	62 Orang	0 Orang	0
Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	0 Lembaga	0	2 Lembaga	0 Lembaga	0
Fasilitasi Lomba Desa/Kel	Jumlah Desa	8 Desa	8 Desa	0 Desa	0	8 Desa	0 Desa	0
Fasilitasi Pemberdayaan PKK	Jumlah Fasilitasi	2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	100	2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	100
Pelaksanaan Kerja TIM Asistenasi dan Verifikasi APBDes (Pendampingan ADD dan Dana Desa)	Jumlah Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	100	8 Desa	8 Desa	100

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan, dimana kedudukan, tugas dan wewenang adalah bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana tekniskewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melaluisekretaris daerah.Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: (a) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; (b) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; (c) mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; (d) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; (e) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; (f) membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan (g) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnyadan/atau yang belum dapat dilaksana kan pemerintahan desa.Selain itu Camat melaksanakan kewenanganpemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusanotonomi daerah, yang meliputi aspek:a. perizinan;b. rekomendasi;c. koordinasi;d. pembinaan;e. pengawasan;f. fasilitasi;g. penetapan;h. penyelenggaraan; dani. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain. Kecamatan dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah kabupaten. Camat mempunyai tugas: a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum; b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota; e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupatiuntuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Loa Janan (KLJ) berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan minimal, dimana indikator disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan Loa Janan sebagaimana uraian tugas camat diatas. Pencapaian kinerja Kecamatan Loa Janan, *tabel 2.2.*

Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN LOA JANAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA - PD					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			75	85	85	85	85	75	0	85	85	Realisasi capaian tahun 2022 belum ada karena masih berjalan
	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			75	85	85	85	85	70	0	85	85	
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa			70	70	70	70	70	0	0	70	70	
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan			65	65	65	65	65	0	0	65	65	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Posisi kecamatan selain sebagai perangkat daerah atau perwakilan pemerintah di wilayah kerjanya, kecamatan juga memiliki posisi terdepan dalam melayani masyarakat, dimana kecamatan seringkali menjadi wakil masyarakat dalam menyampaikan informasi, aspirasi, saran dan aduan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari proses perjalan kecamatan selama ini dimana seringkali SKPD lainnya selalu meminta data dan informasi dari kecamatan bahkan SKPD lainnya seringkali melibatkan kecamatan untuk mensukseskan program kerjanya meskipun dengan dukungan personil pembiayaan, peralatan dan methode yang sangat terbatas.

Dalam realitasnya seringkali kecamatan menjadi lapisan terdepan dalam melaporkan semua kejadian yang ada di wilayah untuk diteruskan kepada SKPD lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Masyarakat juga menjadikan Kecamatan sebagai tempat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selama ini Kecamatan juga seringkali menjadi tempat untuk masyarakat menyampaikan aduan terhadap pelayanan pemerintah yang tidak memuaskan sebab selama ini masyarakat dan melalui tokoh masyarakat dan perangkat desa menjadikan kecamatan adalah organisasi perangkat daerah yang paling mudah dijangkau.

Demikian pula halnya dengan peran dan fungsi kecamatan, kecamatan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana kecamatan memiliki fungsi atributif dan distributif. Fungsi atributif kecamatan menjalankan fungsi umum pemerintahan dan sebagai fungsi distributif kecamatan menjalankan tugas pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh bupati.

Fungsi atributif dan distributif tersebut meliputi banyak sektor kegiatan. Dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan dapat memerankan diri dengan pendekatan “kewilayahan”, seperti wilayah kecamatan, desa, dan dusun; dan juga dengan pendekatan “sektoral”, seperti sektor pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, ketertiban umum, dan pemberdayaan perempuan. Selama ini pelaksanaan otonomi daerah pemerintah terbelenggu pendekatan sektoral dan gagal memberdayakan camat sebagai ujung

tombak kembar strategi pemerintahan sektoral maupun pendekatan kewilayahan.

Fungsi sektoral kecamatan melalui sekretariat dan 5 seksi yang ada dalam struktur organisasinya maka peran kecamatan semestinya tidak sekedar berbasis kewilayahan sebab Kecamatan sebenarnya telah menjadi perangkat daerah bukanlah perangkat wilayah. Kecamatan semestinya mengedepankan fungsi sektoral. Fungsi sektoral ini menjadikan para Kepala Seksi di Kecamatan dapat memerankan fungsinya secara optimal. Bila 5 seksi dalam organisasi Kecamatan dapat berperan aktif dan kreatif maka akan dicapai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien.

Dengan melihat posisi dan fungsi Kecamatan diatas maka Kecamatan semestinya memiliki peran dan fungsi strategis untuk mensukseskan penyelenggaraan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan keunikan melalui kombinasi pendekatan kewilayahan dan sektoral maka Kecamatan apabila didukung kebijakan, personil, anggaran dan peralatan yang memadahi maka Kecamatan akan menjadi organisasi terdepan dalam mengelola masyarakat beserta sumberdaya yang ada guna percepatan pencapaian MDGs.

Masalah krusial dari belum optimalnya fungsi atributif dan delegatif adalah kebijakan anggaran yang masih memposisikan Kecamatan sebagai organisasi pelengkap bukan utama. Hal ini dari proses pengusulan anggaran sampai dengan pelaksanaannya Kecamatan mendapatkan platform anggaran yang minim dan dengan sistem pengaggaran pola penyeragaman dengan kurang memperhatikan keanekaragaman dan keunikan setiap wilayah kecamatan padahal setiap wilayah kecamatan memiliki perbedaan dan keunggulan masing masing yang sudah tentu pengembangan kecamatan mengunakan pola pendekatan dan strategi yang berbeda.

Peningkatan kuantitas/jumlah pegawai kecamatan dengan menempatkan pegawai yang ada di SKPD lainnya yang memiliki kualifikasi sebagai jabatan fungsional untuk ditempatkan di Kecamatan. Selama ini di SOTK Kecamatan ada jabatan fungsional namun belum pernah dimanfaatkan. Sementara itu untuk mendukung tugas dan fungsinya khususnya pelaksanaan Paten

harus di dukung kelayakan teknis maka tidak pelak lagi perlunya pendistribusian tim teknis yang berkualifikasi untuk ditempatkan di kecmatan sebagai jabatan fungsional.

Peningkatan kualitas pegawai di Kecamatan. Selama ini pegawai Kecamatan jarang diikutsertakan dalam berbagai pengembangan sumberdaya manusia yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten, bahkan ada kecenderungan orang kabupaten merasa pintar dan mampu, di internal organisasi sendiri jarang dilaksanakan pengembangan SDM pegawai kecamatan. Untuk mendukung pengembangan SDM Kecamatan ke depan maka perlu diagendakan adanya pengembangan SDM Kecamatan berbasis tugas pokok dan fungsinya, sehingga para Kasi Kecamatan bisa memerankan dirinya sebagai PPTK yang handal. Sebab selama ini para Kasi Kecamatan belum secara riil dimanfaatkan dan mampu menjadi PPTK Kegiatan.

Untuk mendukung optimalisasi fungsi atributif dan delegatif adalah kebijakan anggaran yang proposial sesuai dengan beban kerja dan kondisi wilayah serta target capaian pengembangan wilayah. Untuk hal tersebut perlu dipersiapkan langkah sebagai berikut :

a. Perencanaan anggaran : perencanaan anggaran Kecamatan semestinya berbasis tugas pokok dan fungsinya. Artinya setiap pelaksanaan fungsi organisasi harus dirancang kegiatannya secara struktur dengan pembiayaan yang memadai. Selama ini Kecamatan hanya memiliki 2 program kegiatan yaitu program administrasi perkantoran dan sarana prasarana perkantoran, semestinya ke depan perlu disusun rencana kergiatan anggaran berbasis PPTK artinya masing masing pejabat struktural memiliki rencana kerja yang nyata sesuai dengan kebutuhan yang ada yang perlu didanai. Hal ini penting sebab setelah menjadi perangkat daerah bukan kepala wilayah maka yang dikedepankan dari fungsi kecamatan bukan fungsi kewilayahan namun fungsi sektoral sesuai dengan sektor/bidang tugas masing masing pejabat struktural.
b. Pelaksanaan anggaran : dalam pelaksanaan anggaran kecamatan diupayakan sedemikian rupa menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dimana aspek visoner, tranparansi, partisipasi, akuntabel, efektif dan efisien menjadi arah dari pelaksanaan kegiatan. Ini penting sebab selama ini seakan yang mengelola

kegiatan hanya pengguna anggaran dan bendahara, sementara fungsi PA dan PPTK belum optimalkan secara nyata. Secara logika pekerjaan besar bila melibatkan kekuatan besar akan berhasil.

c. Evaluasi anggaran. Yang tidak kalah penting adalah evaluasi pelaksanaan anggaran, dimana setiap anggaran belanja daerah semestinya berbasis kinerja dengan tolok ukur penilaian bukan hanya *output* namun juga *outcame* bahkan samapai kepada dampak dari kegiatan. Semestinya Lakip yang saat ini digunakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pemerintahan seakan hanya formalitas, maka kedepan Lakip diharapkan benar benar menjadi alat ukur untuk mengetahui dampak sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.

4. Aspek Sarana Prasarana :

Untuk menuju *E-Government* memang diperlukan kesiapan sarana dan prasana yang modern dengan dukungan peralatan dan pendukungnya yang modern maka modernisasi pemerintahan yang menjadi parameter reformasi birokrasi yang handal dapat terlaksana. Pemerintahan kedepan harus bisa mengikuti kemajuan jamannya termasuk kemajuan sarana dan prasarana perkantoran yang ada.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD Kecamatan Kembang Janggut adalah perbandingan antara program/kegiatan yang tertuang ke dalam rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan SKPD atau adanya perubahan program kegiatan yang tidak sesuai dengan tupoksi SKPD. Review secara rinci dapat disampaikan sebagaimana dalam Tabel 2.3 dibawah ini :

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Tabel TC 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

: KECAMATAN LOA JANAN
: PEMERINTAH

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGI INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGI INDIKATIF
2	3	4	5		6	7	8	4	10		11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**KEC. LOA JANAN**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**			**8.453.786.268,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**KEC. LOA JANAN**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**			**21.977.368.206,00**
Perencanaan, Penganggaran, dan	**KEC. LOA JANAN**	**Jumlah dokumen**			**296.885.086,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan**	**KEC. LOA JANAN**	**Jumlah dokumen**			**9.930.385.924,00**
Penyusunan Dokumen Perencanaan	KEC. LOA JANAN	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	30.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan	KEC. LOA JANAN	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	140.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan	4	Laporan	266.885.086,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan	4	Laporan	70.000.000,00
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan			5.000.000,00
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan			5.000.000,00
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan			60.000.000,00
						Pelaksanaan Pengumpulan Data	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan			300.000.000,00
						Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan			25.000.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat	**KEC. LOA JANAN**	**Jumlah laporan**			**5.955.646.472,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat**	**KEC. LOA JANAN**	**Jumlah laporan**			**4.662.692.962,00**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KEC. LOA JANAN	Jumlah Orang yang	12	Orang/Bul	5.830.646.472,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KEC. LOA JANAN	Jumlah Orang yang	12	Orang/Bul	4.532.692.962,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	KEC. LOA JANAN	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	100.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	KEC. LOA JANAN	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	-
Koordinasi dan Penyusunan laporan	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan	1	laporan	25.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan laporan	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan	1	laporan	25.000.000,00
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan	KEC. LOA JANAN				80.000.000,00
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis	KEC. LOA JANAN	Jumlah Dokumen	1	dokumen	25.000.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah	**KEC. LOA JANAN**	**Jumlah Barang Milik**			**52.060.000,00**	**Administrasi Barang Milik Daerah**	**KEC. LOA JANAN**	**Jumlah Barang Milik**			**277.060.000,00**
Rekonsiliasi dan penyususunan laporan	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan	1	Laporan	52.060.000,00	Rekonsiliasi dan penyususunan laporan	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan	1	Laporan	52.060.000,00
						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik	KEC. LOA JANAN				50.000.000,00
						Pengamanan Barang Milik Daerah	KEC. LOA JANAN				150.000.000,00
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan	KEC. LOA JANAN				25.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat	**KEC. LOA JANAN**	**Jumlah jenis**			**232.789.050,00**	**Administrasi Umum Perangkat**	**KEC. LOA JANAN**	**Jumlah jenis**			**232.789.050,00**
Penyediaan Komponen Instalasi	KEC. LOA JANAN	Jumlah Paket	7	Paket	7.997.700,00	Penyediaan Komponen Instalasi	KEC. LOA JANAN	Jumlah Paket	7	Paket	7.997.700,00
Penyediaan Peralatan dan	KEC. LOA JANAN	Jumlah Paket Peralatan	70	Paket	40.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan	KEC. LOA JANAN	Jumlah Paket Peralatan	70	Paket	40.000.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KEC. LOA JANAN	Jumlah Paket Peralatan	1	paket	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KEC. LOA JANAN	Jumlah Paket	1	Paket	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KEC. LOA JANAN	Jumlah Paket Bahan	30	Paket	38.060.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KEC. LOA JANAN	Jumlah Paket Bahan	30	Paket	38.060.000,00
		Jumlah Bahan Logistik	1000	Porsi				Jumlah Bahan Logistik	1000	Porsi	
Penyediaan Barang Cetakan dan	KEC. LOA JANAN	Jumlah Paket Barang	5	Paket	10.871.350,00	Penyediaan Barang Cetakan dan	KEC. LOA JANAN	Jumlah Paket Barang	5	Paket	10.871.350,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	KEC. LOA JANAN	Jumlah Paket Barang	1	paket	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KEC. LOA JANAN	Jumlah Paket Barang	1	paket	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan	50	Laporan	85.860.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan	50	Laporan	85.860.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada	KEC. LOA JANAN	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	50.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada	KEC. LOA JANAN	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	50.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	**KEC. LOA JANAN**	**Jumlah waktu**			**480.488.556,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**KEC. LOA JANAN**	**Jumlah waktu**			**480.488.556,00**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan	2	Laporan	128.843.220,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan	2	Laporan	128.843.220,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan	2	Laporan	10.350.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan	2	Laporan	10.350.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan	288	Laporan	341.295.336,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan	288	Laporan	341.295.336,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	**KEC. LOA JANAN**	**Jumlah Barang Milik**			**461.446.714,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**KEC. LOA JANAN**	**Jumlah Barang Milik**			**332.951.714,00**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	KEC. LOA JANAN	Jumlah Kendaraan Dinas	3	Unit	228.495.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	KEC. LOA JANAN	Jumlah Kendaraan Dinas	3	Unit	50.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KEC. LOA JANAN	Jumlah Peralatan dan Mesin	7	unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	KEC. LOA JANAN	Jumlah Kendaraan Dinas			50.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	KEC. LOA JANAN	Jumlah Gedung Kantor	1	Unit	232.951.714,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	KEC. LOA JANAN	Jumlah Gedung Kantor	1	Unit	232.951.714,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di	**KEC. LOA JANAN**	**Jumlah Dokumen**	**1**	**Dokumen**	**-**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di**	**KEC. LOA JANAN**	**Jumlah Dokumen**	**1**	**Dokumen**	**-**
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	KEC. LOA JANAN	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	-	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	KEC. LOA JANAN	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	-
Penyelenggaraan Urusan	**KEC. LOA JANAN**	**Jumlah Standar**			**100.000.000,00**	**KoordinasiPenyelenggaraan**	**KEC. LOA JANAN**	**Jumlah Standar**			**400.000.000,00**
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan	8	Laporan	100.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan	8	Laporan	250.000.000,00
						Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan					150.000.000,00
						Penyelenggaraan Urusan	**KEC. LOA JANAN**	**Jumlah Standar**			**100.000.000,00**
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan					100.000.000,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	**KEC. LOA JANAN**	**Jumlah pelaksanaan**			**417.915.290,00**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan**	**KEC. LOA JANAN**	**Jumlah pelaksanaan**			**4.530.000.000,00**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan	1000	Laporan	15.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan	1000	Laporan	580.000.000,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan	2	Laporan	402.915.290,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan	2	Laporan	3.950.000.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	**KEC. LOA JANAN**	**Jumlah Koordinasi**			**456.555.100,00**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan**	**KEC. LOA JANAN**	**Jumlah Koordinasi**			**100.000.000,00**
Peningkatan Partisipasi Masyarakat	KEC. LOA JANAN	Jumlah Lembaga	200	Lembaga	56.555.100,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	KEC. LOA JANAN	Jumlah Lembaga	200	Lembaga	50.000.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan	125	Laporan	400.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan	125	Laporan	50.000.000,00
						Pemberdayaan Lembaga	**KEC. LOA JANAN**	**Jumlah Koordinasi**			**486.000.000,00**
						Penyelenggaraan Lembaga			5	dokumen	486.000.000,00
						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	**KEC. LOA JANAN**	**Jumlah pelaksanaan**			**215.000.000,00**
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan	1	laporan	40.000.000,00
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan	2	laporan	175.000.000,00
					-	**Penyelenggaraan Urusan**					**230.000.000,00**
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan	5	Laporan	-	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan	5	Laporan	180.000.000,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan	1	Laporan		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	KEC. LOA JANAN	Jumlah Laporan	1	Laporan	50.000.000,00
JUMLAH					**8.453.786.268,00**	**JUMLAH**					**21.977.368.206,00**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, disusun perencanaanpembangunan sebagai kelanjutan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.Perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kabupaten.

Perencanaan pembangunan kecamatan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan secara partisipatif. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari desa, serta menyepakati rencana kegiatan lintas-desadi kecamatan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupatenpada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap tahun pada bulan Februari dengan luaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja Kecamatan (Sesuai dengan PP No.08/2008 dan PP No. 19/2008).

Berikut rekapitulasi usulan program dan kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana Tabel 2.5

Tabel
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025

USULAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANG RKPD TAHUN 2025

Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Pelaksana/Pengampu
4	5	6	7	8	13
Pembangunan Jalan Permukiman Masyarakat	Desa Bakungan	Peningkatan Semenisasi Gang Anggrek RT. 002	100 x 2 Meter	100.000.000	Kecamatan
Pembangunan Jalan Permukiman Masyarakat	Desa Bakungan	Pembangunan Jalan Gang Marta RT. 003	200 x 3 Meter	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Jalan Menuju Ke Perkebunan	Desa Bakungan	Pembangunan 5 Unit Jembatan Penghubung Tepian Manggis RT. 006	5 Buah Jembatan	5.000.000.000	Pekerjaan Umum
Normalisasi Sungai di Permukiman Masyarakat	Desa Bakungan	Normalisasi Sungai Bakungan RT. 006	1000 Meter	1.000.000.000	Pekerjaan Umum
Pembangunan Jalan Menuju Ke Perkebunan	Desa Bakungan	Pembangunan Jalan Tepian Manggis RT. 006	1000 Meter	1.000.000.000	Pekerjaan Umum
Pembangunan Turap Jalan Desa	Desa Bakungan	Pembuatan Turap Sungai Bakungan RT. 006	1000 Meter	1.000.000.000	Pekerjaan Umum
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Bakungan	Pembuatan Drenase Dusun II Tepian Manggis	150 Meter	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Desa	Desa Bakungan	Pembangunan Jalan Akses Menuju Lapangan Bola	40 Meter	150.000.000	Kecamatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Desa	Desa Bakungan	Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Olahraga Desa	Paket	1.000.000.000	Pekerjaan Umum
Perbaikan/Aspalisasi Jalan Desa Bakungan	Desa Bakungan	Aspalisasi Jalan Desa Bakungan	4000 Meter	2.000.000.000	Pekerjaan Umum
Pembangunan Turap Jalan Desa	Desa Bakungan	Pembuatan Drainase Gang 7 (HAMSI)	170 Meter	300.000.000	Kecamatan
Pembangunan Jalan	Desa Bakungan	Lanjutan Semenisasi Jalan Ex PT Cita Pasar Baru	100 x 4 Meter	200.000.000	Kecamatan

Permukiman Masyarakat					
Pembuatan Drainase Dusun 6 Swadaya	Desa Bakungan	Pembuatan Drainase	1000 Meter	1.000.000.000	Pekerjaan Umum
Perbaikan Jalan Umum Desa	Desa Bakungan	Perbaikan Jalan Abrasi RT. 014	1 Paket	500.000.000	Pekerjaan Umum
Pembuatan Drainase Dusun 7 Jahuq	Desa Bakungan	Pembuatan Drainase	2000 Meter	2.000.000.000	Kecamatan
Pembangunan Jalan Permukiman Masyarakat	Desa Bakungan	Lanjutan Pembangunan Jalan Kubur	500 Meter	500.000.000	Kecamatan
Pembangunan Jalan Permukiman Masyarakat	Desa Bakungan	Semenisasi Jalan Gang Moris	500 Meter	500.000.000	Kecamatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa	Desa Bakungan	Pembangunan Posyandu Desa	6 x 6	150.000.000	Kecamatan
Pembangunan Jalan Permukiman Masyarakat	Desa Bakungan	Pembangunan Jalan Tunas Pandan (Menuju Jembatan Penghubung)	300 Meter	1.000.000.000	Kecamatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Desa	Desa Bakungan	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Desa	Paket	1.000.000.000	Kecamatan
Pembangunan Jembatan Penghubung Antar Desa	Desa Bakungan	Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Bakungan dan Loa Duri Ulu	1 Paket	2.000.000.000	Kecamatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana SDN 007 Loa Janan	Desa Bakungan	Pembangunan Pagar dan Gapura Serta Semenisasi Halaman Sekolah SDN. 007 Loa Janan Desa Bakungan	1 Paket	2.000.000.000	Dinas Pendidikan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Desa	Desa Bakungan	Rehabilitasi Pendopo Kuburan Muslimin Tepian Manggis	1 Paket	75.000.000	Kecamatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelompok Nelayan Desa	Desa Bakungan	Peralatan Tangkap Ikan Berupa Tempirai dan Peralatan Penunjang Lainnya	1 Paket	200.000.000	Dinas Perikanan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelompok Budidaya Perikanan	Desa Bakungan	Bantuan Pengadaan Bibit Ikan dan Perlengkapan Lainnya	1 Paket	200.000.000	Dinas Perikanan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelompok Tani Desa	Desa Bakungan	Pengadaan Bantuan Handtraktor, Obat - Obatan, Benih Padi, dan Perlengkapan Pupuk Pertanian	1 Paket	200.000.000	Dinas Pertanian
Pengadaan Sarana dan Prasarana	Desa Bakungan	Pengadaan Bibit Buah - Buahan untuk Perkebunan dan Perlengkapan Lainnya	1 Paket	200.000.000	Dinas Pertanian

Kelompok Tani Desa					
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelompok Tani Desa	Desa Bakungan	Pengadaan Hewan Ternak	1 Paket	200.000.000	Dinas Pertanian
Pengadaan Sarana dan Prasarana Mts Bakungan Loa Janan	Desa Bakungan	Pengadaan Pagar Sekolah Mts Desa Bakungan dan Kursi Murid	1 Paket	200.000.000	Dinas Pendidikan
Pengadaan Sarana dan Prasarana TK/PAUD	Desa Bakungan	Semenisasi Halaman TK/PAUD di Wilayah Desa Bakungan	1 Paket	200.000.000	Dinas Pendidikan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Desa	Desa Bakungan	Pembuatan Pagar Kuburan Muslimin RT. 014	1 Paket	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ulu	Peningkatan/Pengaspalan Gang Solata RT.6	180 m x 2,90 m	150.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ulu	Peningkatan/Pengaspalan Jalan Teratai RT.6	160 m x 4 m x 0,20 m	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ulu	Peningkatan/Pengaspalan Gang Etam RT.7	200 m x 1,50 m	150.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ulu	Peningkatan/Pengaspalan Jalan Bina Putra RT.2	150 m x 2,5 m	152.673.850	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ulu	Peningkatan/Pengaspalan Gang Cempaka 3 RT.3	250 m x 2,8 m	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ulu	Peningkatan/Pengaspalan Jalan Persatuan RT.4 dan RT.18	80 m x 4 m 0,20 m	200.000.000	Kecamatan

Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ulu	Peningkatan Jalan Putak Bugis RT.11	200 m x 4 m x 0,2 m	150.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ulu	Peningkatan Jalan Masaping RT.12	3500 m x 4 m	150.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ulu	Peningkatan Jalan Merandai RT.15			Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ulu	Peningkatan Jalan Dusun Batu Hitam Desa Loa Duri Ulu			Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ulu	Peningkatan Jalan Wisata Bukit Teratai RT.6			Kecamatan
Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Duri Ulu	Penurapan Jalan Johansyah Ruben RT.8	500 m x 4 m x 1 m	1.400.340.000	Kecamatan
Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Duri Ulu	Pembangunan Lanjutan Turap Ulin Jalan Padat Karya RT.15		150.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Duri Ulu	Pembangunan Parit Jalan Perjuangan 1 RT.5		200.000.000	Kecamatan
Drainase Jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Desa Loa Duri Ulu	Pembangunan Drainase RT.10		500.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Drainase Jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Desa Loa Duri Ulu	Pembangunan Drainase Desa Loa Duri Ulu		500.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Drainase Jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Desa Loa Duri Ulu	Pembangunan Box Culvert RT.6		500.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Drainase Jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Desa Loa Duri Ulu	Pembangunan Box Culvert RT.8		500.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Drainase Jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Desa Loa Duri Ulu	Pembangunan Box Culvert RT.17		500.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Penurapan Jalan (Beton/Pasangan Batu)	Desa Loa Duri Ulu	Pembangunan Turap Jalan Lingkungan Desa Loa Duri Ulu RT.8		500.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Desa Loa Duri Ulu	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Loa Duri Ulu		500.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Desa Loa Duri Ulu	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)		500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Desa Loa Duri Ulu	Pembangunan Booster/Reservoir SPAM		500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Desa Loa Duri Ulu	Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)		500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Desa Loa Duri Ulu	Rehabilitasi Jembatan Desa Loa Duri Ulu		500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Desa Loa Duri Ulu	Peningkatan Perkuatan Tebing Sungai Desa Loa Duri Ulu		500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Desa Loa Duri Ulu	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

					Perumahan Rakyat
	Desa Loa Duri Ulu	Penyediaan sarana dan prasarana kawasan pariwisata		500.000.000	Dinas Pariwisata
	Desa Loa Duri Ulu	Pelatihan/Bimtek SDM ekonomi kreatif Desa Loa Duri Ulu		500.000.000	Dinas Pariwisata
	Desa Loa Duri Ulu	Penyediaan Benih/Bibit Ternak Sapi		500.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Desa Loa Duri Ulu	Pengadaan sapi		500.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Desa Loa Duri Ulu	Penyediaan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi (tower)Dusun 4 Masaping		500.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Desa Loa Duri Ulu	Pembangunan Jetty/Pelabuhan Desa		500.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Desa Loa Duri Ulu	Pengadaan Ambulans Desa Darat dan Air		500.000.000	Dinas Kesehatan
	Desa Loa Duri Ulu	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Dusun 5 Batu Hitam		500.000.000	Dinas Kesehatan
	Desa Loa Duri Ulu	Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan digital		500.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Desa Loa Duri Ulu	Pelatihan/Bimtek Aparatur Pemerintahan Desa		500.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Desa Loa Duri Ulu	Pelatihan/Bimtek Badan Permusyawaratan Desa (BPD)		500.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

	Desa Loa Duri Ulu	Bantuan Peralatan kepada BUMDES		500.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Desa Loa Duri Ulu	Pelatihan Anggota Organisasi Kepemudaan yang dilatih berwirausaha		500.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Desa Loa Duri Ulu	Bantuan Sosial bagi fakir miskin		500.000.000	Dinas Sosial
	Desa Loa Duri Ulu	Pengadaan Lampu Jalan Desa Loa Duri Ulu (LPJU)		500.000.000	Dinas Perhubungan
	Desa Loa Duri Ulu	Pembangunan Gedung SD 022 Loa Janan		500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Desa Loa Duri Ulu	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah Masjid Al-Muhajirin RT.12		500.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Desa Loa Duri Ulu	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah Masjid Miftahul Jannah RT.11		500.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Desa Loa Duri Ulu	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah Langgar At-Taqwa RT.14		500.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Desa Loa Duri Ulu	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah Gereja GPPS Al-Shaddai RT.18		500.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Desa Loa Duri Ulu	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah Gereja Bukit Golgota RT.8		500.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Desa Loa Duri Ulu	Peningkatan Lahan Parkir Gereja ST. Yohanes RT.5		500.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Desa Loa Duri Ulu	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pencegahan Kekerasan terhadap anak		500.000.000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	Desa Loa Duri Ulu	Peningkatan Kapasitas sumber daya pemberdayaan perempuan		500.000.000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Desa Loa Duri Ulu	Fasilitasi pelatihan (Pelatihan Olahan Pangan) dan sertifikasi Halal Olahan Pangan bagi IKM		500.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Desa Loa Duri Ulu	Hibah Sarana Peribadatan		500.000.000	Sekretariat Daerah
	Desa Loa Duri Ulu	Pembuatan Parit Pertanian RT 10 dan RT 17 Desa Loa Duri Ulu		500.000.000	Dinas Perkebunan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ilir,	Parit kiri kanan Jl. Ex.PT.EX. PT.Hima	500 m	300.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Duri Ilir,	PEMBANGUNAN PARIT JALAN AIR TERJUN	500 m	300.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Duri Ilir,	Parit RT.23	200 m	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Duri Ilir,	Normalisasi anak sungai	1km	300.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Duri Ilir,	Semenisasi jalan Ex. PT. Hima Menuju Desa purwajaya	6 km	1.000.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Duri Ilir,	Semenisasi Jl. Datar asam RT.10, RT.11, RT.26	1 km x 4 m	800.000.000	Kecamatan

Pembangunan Gedung Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Duri Ilir,	Semenisasi Jl. Air Terjun	500 m x 4 m	800.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ilir,	Semenisasi Jl. Air Terjun	500 m x 4 m	800.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Duri Ilir,	Semenisasi jl. Gunung Batu Dalam	300 x 3 m	500.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ilir,	Semenisasi jl. Padat karya RT.16	500 x 3 m	500.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ilir,	Semenisasi jl. Gunung tunjuk	500 x 3 m	500.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ilir,	Peningkatan jalan/Semenisasi gg. Mentari	300 x 3 m	300.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ilir,	Peningkatan jalan Gg. Air Terjun RT.21 dusun 3	500 x 3 m	500.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Duri Ilir,	Semenisasi Rt.15	3 x 500 m	300.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Duri Ilir,	Semenisasi jalan menuju TPA kecamatan loa janan	1 km x 4 m	500.000.000	Kecamatan

Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ilir,	Semenisasi jalan	100 m x 2,5 m	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Duri Ilir,	Semenisasi jalan menuju wisata desa	300 m x 3 m	600.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Duri Ilir,	Pembuatan Jembatan jl. EX.Hima RT.18 menuju jalan air terjun	6 x8 m	300.000.000	Kecamatan
Pembangunan Turab Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Duri Ilir,	Jembatan jalan kebaktian RT.22	4 x 6 m	350.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Duri Ilir,	Jembatan jln air terjun	4 x 6 m	300.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ilir,	Jembatan jalan RT.16	4 x 6 m	300.000.000	Kecamatan
Pembangunan Jembatan Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Duri Ilir,	Turap jalan ex . Hima RT.11	500 m	800.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Duri Ilir,	Turap wisata desa	500 m	800.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Duri Ilir,	Turap sungai	500 M	800.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ilir,	Bantuan mesin pengolah pakan ikan apung Dan bahan baku pengolahan pakan	1 paket	150.000.000	Kecamatan

Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ilir,	Bantuan peralatan pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan	1 paket	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Duri Ilir,	Bantuan ternak	1 paket	500.000.000	Kecamatan
Pembangunan Gedung Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Duri Ilir,	Pengadaan alat press sampah plastik	1 paket	150.000.000	Kecamatan
Pembangunan Tangga Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Duri Ilir,	Bantuan peralatan kesenian	1 paket	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Tangga Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Duri Ilir,	Pelatihan lembaga kemasyarakatan (LPM, RT, KT, Posyandu)	1 paket	100.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ilir,	Bantuan Pelatihan umkm	1 paket	50.000.000	Kecamatan
Pembangunan Kolam Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Duri Ilir,	pelatihan pokdarwis	1 paket	100.000.000	Kecamatan
Pembangunan Kolam Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Duri Ilir,	Pelatihan Fardu kifayah	1 paket	100.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ilir,	Pembangunan Posyandu	2 paket	300.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ilir,	Pembangunan/pembuatan wisata desa	1 paket	2.000.000.000	Kecamatan

Pembangunan Gedung Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Duri Ilir,	Pembangunan rumah ibadah	1 paket	300.000.000	Kecamatan
Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ilir,	Pembangunan Masjid Jami' Al Huda	1 paket	300.000.000	Kecamatan
Pembangunan Gedung Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Duri Ilir,	Pembangunan masjid Al Istiqomah	1 paket	300.000.000	Kecamatan
Pembangunan Gedung Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Duri Ilir,	Pembangunan Masjid Al Yaqin	1 paket	300.000.000	Kecamatan
Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ilir,	Pembangunan Mushola An Nur	1 paket	300.000.000	Kecamatan
Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ilir,	Pembangunan BPU Desa loa duri ilir	1 paket	3.000.000.000	Kecamatan
Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ilir,	Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu	1 paket	4.000.000.000	Kecamatan
Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ilir,	Pembangunan ruko pasar desa loa duri ilir	1 paket	500.000.000	Kecamatan
Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ilir,	Pembebasan lahan lamin adat putak	1 paket	300.000.000	Kecamatan
Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan	Desa Loa Duri Ilir,	Pembangunan lamin adat putak	1 paket	1.000.000.000	Kecamatan

dan Kelurahan/ Desa					
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ilir,	PEMBANGUNAN SDN 013 DUSUN 6	1 paket	1.000.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ilir,	Pembangunan perpustakaan desa	1 paket	300.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ilir,	Pematangan lahan wisata desa	1 paket	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ilir,	Jaringan listrik dan lampu jalan jl. Datar asam	1 paket	500.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ilir,	Jaringan listrik dan lampu jalan jl. Ex. Pt.hima	1 paket	500.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ilir,	Pembangunan UMKM Di Lokasi wisata	1 paket	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ilir,	Pembangunan taman di lokasi wisata	1 paket	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Duri Ilir,	Pembangunan rumah tidak layak huni	1 paket	375.000.000	Kecamatan

Peningkatan /Pemeliharaan Jembatan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Janan Ulu	Rehab Jembatan Jl. H. Kasiani RT. 36	25 M x 4 M	800.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Janan Ulu	Semenisasi Jalan Lapangan Tembak RT. 20	270 M x 4 M x 0,20 M	300.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Janan Ulu	Lanjutan Semenisasi Jalan Tanjung Sari	700 M x 3,5 M x 0,15 M	1.500.000.000	Kecamatan
Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Janan Ulu	Pembuatan Turap Sungai Loa Ranten RT. 34 - RT. 17	250 M x 2 M	450.000.000	Kecamatan
	Desa Loa Janan Ulu	Penataan Ruang Terbuka Hijau Bantaran Sungai Mahakam	75 M x 15 M	500.000.000	Kecamatan
Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Janan Ulu	Pembuatan Turap Sungai Loa Ranten RT. 34	200 M x 2 M	400.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Janan Ulu	Semenisasi Jalan Gg. Maduratna 1 dan 2 RT. 9	1000 M x 1,5 M	250.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Janan Ulu	Peningkatan Jalan, Pembuatan Turap dan Pembuatan Gorong-gorong Gg. Wanyi RT. 29	Paket	300.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Janan Ulu	Semenisasi Jalan Gunung Batu RT. 4	100 M x 5 x 0,15	400.000.000	Kecamatan
	Desa Loa Janan Ulu	Normalisasi Parit Jl. Manunggal 1, Jl. Manunggal 2 & Jl. AM. Parikesit RT. 2, RT. 19, RT. 21, RT. 18	1 KM	200.000.000	Kecamatan

Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Janan Ulu	Pembuatan Turap Sungai Loa Ranten RT. 1	150 M x 1,5 M	250.000.000	Kecamatan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Janan Ulu	Peningkatan Lapangan Volly RT. 21	20 M x 17 M x 0,10 M	100.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Janan Ulu	Peningkatan / Pengaspalan Jalan Karet Poros RT. 28, RT. 10 dan RT. 8	300 M	300.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Janan Ulu	Peningkatan Jalan Padat Karya RT. 33	700 M x 3 x 0,15	1.500.000.000	Kecamatan
Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Janan Ulu	Pembuatan Turap Pemakaman Muslim RT. 17	75 M x 2 M	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Janan Ulu	Peningkatan Jalan Gg. Cahaya ke Blok D RT. 28 dan RT. 29	280 M	250.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Janan Ulu	Pembuatan Jalan Tembus RT 30, Pembangunan 8 ke Gg. Yusuf	Paket	300.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Janan Ulu	Peningkatan Jalan H. Masdar RT. 25	50 M0 x 3 x 0,15	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Janan Ulu	Peningkatan Jalan 611 ke Pelita RT. 30, RT. 29, dan RT. 8	250 M	300.000.000	Kecamatan

Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Janan Ulu	Lanjutan Semenisasi Jalan Gg. 45 RT. 31	300 M x 0,15 x 3,5	400.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Janan Ulu	Peningkatan Jalan Garuda 4 RT. 27	150 M	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Janan Ulu	Pengerasan Dan Semenisasi Jalan Tembus Dusun Tegal Anyar ke Loa Ranten	700 M x 6 M x 0,20 M	2.000.000.000	Kecamatan
	Desa Loa Janan Ulu	Studi Tiru Bidang Pertanian / Green House	25 Orang	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Janan Ulu	Lanjutan Drainase RT. 32	50 M X 1 M	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Janan Ulu	Pembuatan Drainase Gg. Kaswari RT. 36	160 M	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Janan Ulu	Pembuatan Drainase Gg. Amanah RT. 27 dan RT. 36	150 M	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Janan Ulu	Peningkatan Jalan Blok F1 dan F2 RT. 28 dan RT. 29	300 M	400.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Janan Ulu	Pembuatan Drainase Lanjutan Blok F, F1 dan F2 RT. 28 dan RT. 29	500 M	400.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan	Desa Loa Janan Ulu	Peningkatan Jalan Poros Pelita RT. 8	200 M	200.000.000	Kecamatan

Kelurahan/ Desa					
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Janan Ulu	Peningkatan Jalan Gg. Tower RT. 8 dan RT. 27	165 M	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Janan Ulu	Peningkatan Jalan Kompas RT. 27	120 M	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Janan Ulu	Lanjutan Peningkatan Jalan Garuda Poros RT. 36	500 M	600.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Janan Ulu	Lanjutan Peningkatan Jalan Garuda Poros RT. 27	500 M	600.000.000	Kecamatan
	Desa Loa Janan Ulu	Pengadaan Tabulampot	1000 Pohon	200.000.000	Kecamatan
	Desa Loa Janan Ulu	Normalisasi Sungai Loa Janan Ulu RT. 10, RT. 28, RT. 8, RT. 27, RT. 36	1 KM	3.000.000.000	Kecamatan
Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Janan Ulu	Lanjutan Turap Kuburan RT. 4	40 M	400.000.000	Kecamatan
Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Janan Ulu	Pembuatan Turap Sungai Loa Janan RT. 5	40 M	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Janan Ulu	Lanjutan Turap Stadion Mini RT. 33	100 M	400.000.000	Kecamatan

Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Janan Ulu	Peningkatan Jalan Rahma RT. 26	100 M x 4 x 0,20	400.000.000	Kecamatan
Pembuatan Irigasi Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Janan Ulu	Pembuatan Irigasi RT. 5	1000 M	1.000.000.000	Kecamatan
	Desa Loa Janan Ulu	Pengadaan Bibit Ikan dan Pakan Gurame	15000 Bibit dan 5 Ton Pakan	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Loa Janan Ulu	Pembuatan Turap Jalan Padat Karya RT. 33	100 M	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Loa Janan Ulu	Pembuatan Badan Jalan Stadion Mini RT. 24	700 M	400.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	Lanjutan semenisasi jalan supeno rt. 21	500 m x 4 m x 0.15	600.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	semenisasi gang wakaf RT. 21	70 m x 2 m x 20 m	150.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	semenisasi gang rahmat RT. 21	350 m x 3 m x 15 m	700.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	semenisasi gang ukung RT. 21	200 m x 3 m x 0.15 m	250.000.000	Kecamatan

Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	Semenisasi gang keluarga RT. 21	100 m x 3 m x 0.20 m	1.500.000.000	
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa purwajaya	Dreanase RT. 21	1000 m	1.000.000.000	
Pembangunan penurapan Desa/kelurahan dengan kontruksi sederhana	Desa purwajaya	Penurapan anak sungai RT. 21	1800 M kanan kiri	2.000.000.000	
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa purwajaya	Draenase gang ukung RT. 21	200 m	300.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa purwajaya	Dreanase jalan supeno RT. 21	600 m	900.000.000	Kecamatan
pembangunan gedung Desa/kelurahan	Desa purwajaya	Pembangunan langgar jabal nur RT. 21	18 m x 18 m	1.000.000.000	Kecamatan
pembangunan gapura desa/kelurahan	Desa purwajaya	Pembangunan gapura batas desa purwajaya dan desa loa duri ilir	18 m x 18 m	300.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	pembuatan badan jalan gang slamet RT. 21	100 m x 3 m x 0.20 m	180.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	Lanjutan semenisasi jalan pelita RT. 21	500 m x 5 m x 0.20	1.500.000.000	Kecamatan
Pembangunan jembatan desa/kelurahan	Desa purwajaya	pembangunan jembatan jalan usaha tani RT. 13	P : 6 m x L : 3	200.000.000	Kecamatan

Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	Lanjutan badan jalan gang kamsun RT. 13	200 m x 4 m	360.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa purwajaya	semenisasi parit RT. 13	200 m	270.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa purwajaya	Perbaikan sumber air dusun sari mulya B	8 m x 16 m	150.000.000	Kecamatan
Pembangunan gedung Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa purwajaya	Pembangunan posyandu dusun sari mulya B	3 x 18	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan gedung Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa purwajaya	Pembangunan lapangan bola dusun sari mulya b	40 m x 80 m	500.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa purwajaya	Dreanase gang anyar RT. 04	300 m	380.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa purwajaya	Dreanase gang sadulur RT. 04	300 m	380.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa purwajaya	pondasi / turap gang TNI RT. 04	150	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	semenisasi gang mawar RT. 07		200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	semenisasi gang lapangan RT. 07		200.000.000	Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa purwajaya	Dreanase perbatasan parit pak oban dan pak aca RT. 07		200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa purwajaya	Lanjutan Dreanase gang balong gede RT. 07		200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa purwajaya	Lanjuta parit RT. 07 dan RT. 08		200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	semenisasi gang tanjung RT. 08		200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	Lanjutan semenisasi gang polos RT. 08		200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	Lanjuta semenisasi gang keluarga RT. 08		200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa purwajaya	Pembangaunan parit gang damai RT. 08		200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa purwajaya	pembangunan gorong - gorong RT. 08		200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	Lanjutan jalan agung RT. 09	50 m	200.000.000	Kecamatan

Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	pembuatan badan jalan gang etam RT. 09	100 m x 2 m	180.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	semenisasi gang rosela RT. 09	100 m x 2.5 m x 0.20	180.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa purwajaya	Lanjuta parit RT. 08 dan RT. 09	paket	350.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa purwajaya	Dreanase parit RT. 14	650 m	650.000.000	Kecamatan
pembangunan gedung desa/kelurahan	Desa purwajaya	rehap BPU dusun marga mulya RT. 14	paket	350.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa purwajaya	Draenase RT. 15	400 m	350.000.000	Kecamatan
Pembangunan jembatan Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa purwajaya	pembangunan jembatan gang rukun RT. 15	paket	150.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	semenisasi depan rumah pak lasmo RT. 15	200 m x 3 m x 0.15	350.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	penurapan dan semenisasi gang arcia RT. 15	80 m x 2.5 m x 0.15	150.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan	Desa purwajaya	semenisasi gang bubuhan RT. 20	100 m x 2 m x 0.20 m	180.000.000	Kecamatan

Kelurahan/ Desa					
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	semenisasi gang parel RT. 20	100 m x 2 m x 0.20 m	180.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	semenisasi gang salam RT. 20	100 m x 2 m x 0.20 m	180.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan gedung Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	pembangunan gedung invetarisasi RT. 20	12 m x 12 m	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	semenisasi gang kulon RT. 10	100 m x 2 m x 0.20 m	180.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa purwajaya	Dreanase parit RT. 10	400 m	600.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	Lanjutan semenisasi jalan pelita	3000 x 5 m x 0.20 m	2.000.000.000	pu
Peningkatan /Pemeliharaan sungai Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	lanjutan normalisasi sungai jatah	4000 m	1.700.000.000	pu
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	semenisasi gang sadulur RT. 12	100 m x 3 m x 0.15 m	180.000.000	Kecamatan

Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	semenisasi gang sengon 2 RT. 12	150 m x 3 m x 0.15 m	250.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	semenisasi gang mawar RT. 12	80 m x 2 m x 0.15 m	100.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan gapura Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	pembangunan gapura makam dusun sari mulya	paket	150.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	semenisasi gang ikhlas RT. 11	120 m x 2,5 m x 0.15 m	19.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	lanjutan semenisasi gang makmur RT. 11	90 m x 2.5 m x 0.15 m	120.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	semenisasi jalan lapangan serba guna RT. 16	120 m x 2,5 m x 0.15 m	195.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	lanjutan semenisasi gang air RT. 16	100 m x 2.5 m x 0.15 m	180.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	lanjutan semenisasi jalan beringin jaya RT. 16	65 m x 5 m x 0.20 m	1.500.000.000	pu
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	lanjutan semenisasi gang inul RT. 16	100 m x 2.5 m x 0.15 m	180.000.000	kec

Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	semenisasi gang sutarno RT. 18	100 m x 2.5 m x 0.15 m	180.000.000	kec
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	semenisasi gang bebek RT. 18	100 m x 2.5 m x 0.15 m	180.000.000	kec
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	semenisasi gang makmur RT. 18	100 m x 2.5 m x 0.15 m	180.000.000	kec
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	semenisasi jalan padaringan	1500 m x 3 m x 0.15	1.500.000.000	pu
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa purwajaya	lanjutan draenase RT. 02	200 m	200.000.000	kec
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa purwajaya	turap jalan padarigan RT. 02	p 25 m x t 7 m	200.000.000	kec
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa purwajaya	bronjong padaringan RT. 02	paket	200.000.000	kec
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	semenisasi gang rukun RT. 06	150 m x 2 m x 0.15 m	160.000.000	kec
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	semenisasi gang saudara RT. 06	150 m x 2 m x 0.15 m	160.000.000	kec

Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa purwajaya	draenase RT. 06	100 m	200.000.000	kec
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	semenisasi gang pot / gang mutiara RT. 01	150 m x 3 m x 0.15 m	200.000.000	kec
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	pembuatan badan dan pondasi jalan gang rukun RT. 04	150 m x 3 m x 0.15 m	200.000.000	kec
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	semenisasi gang baraya 1 RT. 04	70 m x 1.30 m x 0.15	200.000.000	kec
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	semenisasi baraya 2 RT. 04	80 m x 1.30 m x 0.15 m	200.000.000	kec
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	semenisas jalan swadaya rt. 19	175 m x 3 m x 0.20	295.000.000	kec
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	turap jalan swadaya RT. 19	p 100 m x t 1.5 m	200.000.000	kec
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa purwajaya	draenasse jalan swadaya RT. 19	130 m	265.000.000	kec
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	turap gang iklas RT. 19	140 m	300.000.000	kec

Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	pembuatan badan jalan dan pengerasan gang langgar RT. 19	100 m x 3 m	150.000.000	kec
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	pembuatan badan jalan dan pengerasan gang flamboyan RT. 19	130 m x 3 m	175.000.000	kec
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	pembuatan badan jalan dan pengerasan gang karya tunggal RT. 19	130 m x 3 m	175.000.000	kec
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	pembuatan badan jalan dan pondasi gang tanggul RT. 04	150 m x 2 m	160.000.000	kec
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	semenisasi gang lestari RT. 19	120 m x 2.5 m 0.20 m	160.000.000	kec
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	semenisasi gang karya baru RT. 19	52 m x 2.5 m x 0.20 m	100.000.000	kec
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	semenisasi gang masasmo RT. 19	150 m x 2.5 m x 0.15	180.000.000	kec
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	pembuatan badan jalan gang karya 8 RT. 19	120 m x 3 m	150.000.000	kec
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan	Desa purwajaya	semenisasi gang karya 2 RT. 19	800 m x 4 m	700.000.000	pu

Kelurahan/ Desa					
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	pembuatan badan jalan RT. 20 ke RT. 02	80 m x 2.5 m x 0.15 m	120.000.000	kec
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	semenisasi gang rindu RT. 16	100 m x 2.5 m x 0.15 m	120.000.000	kec
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	semenisasi gang saluyu rt. 03	150 m x 2.5 m x 0.15	200.000.000	kec
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa purwajaya	pembangunan parit gang saluyu RT. 03	200 m	200.000.000	kec
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa purwajaya	pembangunan parit belakang SDN 004 RT. 03	100 m	160.000.000	kec
Pembangunan jembatan Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa purwajaya	Pembangunan jembatan lapangan bola RT. 03	4 m x 2 m	150.000.000	
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa purwajaya	semenisasi gang swadaya rt. 03	200 m x 3 m x 0.15	350.000.000	kec
	Desa purwajaya	pengadaan alsitan kelompok tani	paket	200.000.000	dinas
	Desa purwajaya	pengadaan sabrodi (pupuk NPK) kelompok tani	paket	400.000.000	dinas

	Desa purwajaya	pengadaan tanaman bibit holtikultura kelompok tani	paket	400.000.000	dinas
	Desa purwajaya	pengadaan handprayer kelompok tani	400 unit	1.500.000.000	dinas
	Desa purwajaya	pemgadaan hand traktor kelompok tani	150 unit	1.500.000.000	dinas
	Desa purwajaya	pengadaan bibit padi kelompok tani	paket	300.000.000	dinas
	Desa purwajaya	pengadaan kapur delomit kelompok tani	paket	300.000.000	dinas
	Desa purwajaya	pengadaan kultivator kelompok tani	paket	300.000.000	dinas
	Desa purwajaya	pengadaan bibit ikan dan pakan ikan kelompok ikan	paket	400.000.000	dinas
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Tani Bhakti	Peningkatan Jalan Poros Desa Tani Bhakti	2000 M	4.000.000.000	Dinas PU
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Tani Bhakti	Semenisasi Jalan GG. Famili RT.008 Dusun Karya Bhakti	200 M	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Tani Bhakti	Lanjutan Semenisasi Jalan RT.008 Dusun Karya Bhakti	3 x 100 M	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Tani Bhakti	Lanjutan Semenisasi Jalan Kolektif RT.013 Dusun Bhakti Luhur	4 x 100 M	200.000.000	Kecamatan

Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Tani Bhakti	Semenisasi Jalan Gang Lia RT 004 Dusun Bhakti Luhur	3 x 100 M	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Tani Bhakti	Semenisasi jalan Gang 02 RT.012 Dusun Manunggal Jaya	200 M	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Tani Bhakti	Peningkatan jalan gang berkah RT.012 Dusun Manunggal Jaya	200 M	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Tani Bhakti	Lanjutan Semenisasi jalan Bukit Makmur RT.002 Dusun Bhakti Luhur	4 x 100 M	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Tani Bhakti	Pengerasan Jalan RT.002 Dusun Bhakti Luhur	200 M	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Tani Bhakti	Peningkatan Jalan GG Maniso RT.001 Dusun Bhakti Luhur	4 x 100 M	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Tani Bhakti	Lanjutan Semenisasi GG Gereja RT.001 Dusun Bhakti Luhur	4 x 100 M	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Tani Bhakti	Peningkatan Jalan GG Langgar RT.001 Dusun Bhakti Luhur	4 x 100 M	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan	Desa Tani Bhakti	Semenisasi Jalan GG. Makmur RT.001 Dusun Bhakti Luhur	4 x 100 M	200.000.000	Kecamatan

Kelurahan/ Desa					
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Tani Bhakti	Lanjutan Semenisasi GG Prayit RT.004 Dusun Bhakti Luhur	4 x 100 M	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Tani Bhakti	Semenisasi Jalan Cisumur RT.009 Dusun Karya Bhakti	1 Paket	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Tani Bhakti	Lanjutan Drainase Parit Jalan RT.003 Dusun Bhakti Luhur	200 M	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Tani Bhakti	Drainase Parit Jalan RT.013 Dusun Bhakti Luhur	200 M	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Tani Bhakti	Drainase Parit Jalan RT.010 Dusun Manunggal Jaya	200 M	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Tani Bhakti	Drainase Parit Jalan RT.012 Dusun Manunggal Jaya	200 M	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Tani Bhakti	Drainase Parit Jalan gg Jeruk RT.002 Dusun Bhakti Luhur	200 M	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Tani Bhakti	Normalisasi Parit RT.006 008,dan 009 Dusun Karya Bhakti	1000 M	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Tani Bhakti	Normalisasi Parit RT.010 dan RT. 012 Dusun Manunggal jaya	1000 M	200.000.000	Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Tani Bhakti	Normalisasi Parit RT.002 dan RT. 004 Dusun Bhakti Luhur	1000 M	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Tani Bhakti	Drainase Parit jalan RT.009 Dusun Karya Bhakti	200 M	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Tani Bhakti	Drainase Parit Jalan Poros Desa Tani Bhakti RT. 005,006,008 dan RT.009 Dusun Karya Bhakti	1000 M	1.000.000.000	Dinas PU
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Tani Bhakti	Normalisasi Sungai Tani Bhakti	1000 M	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Tani Bhakti	Drainase Parit Jln. Sampai Hati RT.001 Dusun Bhakti Luhur	200 M	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Jembatan Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Tani Bhakti	Pembangunan Jembatan Beton RT.010 Dusun Manunggal Jaya	Paket	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Jembatan Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Tani Bhakti	Rehab Jembatan Ulin RT. 003 Desa Tani Bhakti	Paket	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Tani Bhakti	Turap Parit RT.002 Dusun Bhakti Luhur	Paket	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Tani Bhakti	Turap sungai Dusun Karya Bhakti	1000 M	1.000.000.000	Dinas PU
Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Tani Bhakti	Turap Jalan Gang Jono RT 009 Dusun Karya Bhakti	1 Paket	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan	Desa Batuah	Pembangunan Parit Dusun Batuah	150 M	200.000.000	Kecamatan

Konstruksi Sederhana					
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Batuah	Pembangunan Parit Jalan H.Muh Junaid	Paket	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Batuah	Pembangunan Parit Jalan H. Muh Jabir	Paket	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Batuah	Pembangunan Parit Dusun Tani Maju	150 M	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Batuah	Pembangunan Parit Dusun Tani Maju	150 M	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Batuah	Pembangunan Parit Dusun Surya Bhakti	300 M	300.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Batuah	Pembangunan Parit Dusun Tani Jaya	300 M	300.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Batuah	Pembangunan Parit		250.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Batuah	Pembuatan Gorong-gorong	Paket	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Batuah	Pembuatan Gorong-gorong	Paket	200.000.000	Kecamatan

Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Batuah	Pembuatan Gorong-gorong	Paket	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Batuah	Pembuatan Gorong-gorong	Paket	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Batuah	Pembuatan Gorong-gorong	Paket	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Batuah	Lanjutan Semenisasi Jalan KM 25 Dalam	300 M x 4 M x 0,20 M	300.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Batuah	Semenisasi Jalan Perkebunan	Paket	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Batuah	Semenisasi Jalan Lingkar Kuburan	Paket	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Batuah	Semenisasi Jalan Menuju Kuburan	200 M x 3,5 M x 0,20 M	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Batuah	Semenisasi Gang Family	Paket	250.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan	Desa Batuah	Semenisasi Jalan Menuju Kuburan	Paket	250.000.000	Kecamatan

Kelurahan/ Desa					
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Batuah	Pengerasan Jalan	Paket	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Batuah	Semenisasi Halaman SDN 021 Loa Janan	Paket	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Batuah	Semenisasi Jalan Usaha Tani	Paket	250.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Batuah	Lanjutan Semenisasi Gg Hj. Amang	350 M x 4 M x 0,20 M	350.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Batuah	Semenisasi Jalan Usaha Tani Gg. Mawar	300 M x 4 M x 0,20 M	350.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Batuah	Semenisasi Jalan RT.17 Menuju Surya Bhakti	3000 M x 4 M x 0,20 M	3.000.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Batuah	Lanjutan Semenisasi Lingkar Dusun dari RT. 18 Menuju RT.3	Paket	1.000.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Batuah	Semenisasi Jalan Lingkar Dusun Karya Makmur	2000 M x 4 M x 0,20 M	2.000.000.000	Kecamatan

Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Batuah	Lanjutan Semenisasi Dusun Tani Bahagia	800 M x 4 M x 0,20 M	800.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Batuah	Semenisasi Jl. H. Mantang	1000 M x 4 M x 0,20 M	1.019.122.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Batuah	Lanjutan Semenisasi Jalan Pulau Sulawesi	Paket	250.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Batuah	Lanjutan Jalan Menuju Kuburan RT. 18	3 x 200 M	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Batuah	Perbaikan Jalan Semenisasi	4 x 2000 M	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Batuah	Semenisasi Jalan H. Rakka	4 x 130 M	250.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Batuah	Lanjutan Semenisasi Ke Jalan Teppoe	100 M	250.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Batuah	Semenisasi Jalan Menuju RT.49	Paket	300.000.000	Kecamatan
Pembangunan jembatan desa/kelurahan	Desa Batuah	Perbaikan Jembatan Dusun Karya Tani	Paket	2.000.000.000	Kecamatan

Pembangunan jembatan desa/kelurahan	Desa Batuah	Pembuatan RT. 18 Jalan H. Muh Jabir	Paket	500.000.000	Kecamatan
Pembangunan jembatan desa/kelurahan	Desa Batuah	Pembuatan Jembatan RT .09	Paket	1.000.000.000	Kecamatan
Pembangunan jembatan desa/kelurahan	Desa Batuah	Pembuatan Jembatan RT .20	Paket	1.000.000.000	Kecamatan
Pembangunan jembatan desa/kelurahan	Desa Batuah	Rehab Jembatan Abd. Wahab	Paket	1.000.000.000	Kecamatan
	Desa Batuah	Pembangunan Bendungan Air karya Makmur untuk PDAM Mini	Paket	1.000.000.000	Kecamatan
	Desa Batuah	Pelatihan Kelompok Tani Desa Batuah		200.000.000	Kecamatan
	Desa Batuah	Pengadaan Saprodi Kelompok Tani		200.000.000	Kecamatan
Pembangunan gedung Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Batuah	Pembangunan Posyandu	Paket	500.000.000	Kecamatan
Pembangunan gedung Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Batuah	Pembangunan Posyandu	Paket	500.000.000	Kecamatan
Pembangunan gedung Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Batuah	Pembangunan Balai Dusun se Batuah	Paket	500.000.000	Kecamatan
Pembangunan gedung Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Batuah	Pembangunan Posyandu	Paket	500.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Batuah	Jaringan Listrik	Paket	500.000.000	Kecamatan

Pembangunan gedung Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Batuah	Rehab Masjid Nurul Huda	Paket	500.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Batuah	Pengadaaan Jaringan Listrik	Paket	2.000.000.000	Kecamatan
Pembangunan gedung Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Batuah	Pembangunan Posyandu	Paket	500.000.000	Kecamatan
Pembangunan gedung Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Batuah	Pembangunan Pagar Masjid Nurul Hidayah	Paket	500.000.000	Kecamatan
Pembangunan gedung Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Batuah	Lanjutan Pembangunan Pasar Sentral Batuah/Pasar Tradisional	Paket	2.000.000.000	Kecamatan
Pembangunan gedung Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Batuah	Rehab TK Negeri	Paket	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan gedung Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Batuah	Lanjutan Pembangunan Mesjid Al Makmur	Paket	5.000.000.000	Kecamatan
	Desa Batuah	Pengadaaan Sumur Bor	Paket	150.000.000	Kecamatan
	Desa Batuah	Pengadaaan Sumur Bor	Paket	150.000.000	Kecamatan
	Desa Batuah	Sumur Bor Pusban Dusun Tani Jaya	Paket	200.000.000	Kecamatan
	Desa Batuah	Pengaadaan Pipanisasi	Paket	200.000.000	Kecamatan

	Desa Batuah	Pengaadaan Pipanisasi	Paket	200.000.000	Kecamatan
	Desa Batuah	Pengaadaan Pipanisasi	Paket	200.000.000	Kecamatan
	Desa Batuah	Pengaadaan Pipanisasi	Paket	200.000.000	Kecamatan
	Desa Batuah	Pengaadaan Pipanisasi	Paket	200.000.000	Kecamatan
	Desa Batuah	Pengaadaan Pipanisasi	Paket	200.000.000	Kecamatan
	Desa Batuah	Pengaadaan Pipanisasi	Paket	200.000.000	Kecamatan
	Desa Batuah	Pengaadaan Pipanisasi RT.12	1000 M	200.000.000	Kecamatan
	Desa Batuah	Pengaadaan Pipanisasi RT.16	1000 M	200.000.000	Kecamatan
	Desa Batuah	Pengaadaan Pipanisasi Pamsimas Dusun Karya Makmur	1000 M	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan gedung Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Batuah	Rehab Langgar Syech Yusuf	Paket	1.000.000.000	Kecamatan
Pembangunan gedung Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Batuah	Pembangunan Rumah Data Kampung KB	Paket	500.000.000	Kecamatan
Pembangunan gedung Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Batuah	Pembangunan Gedung Raudhatul Atfal	Paket	1.000.000.000	Kecamatan

Pembangunan gedung Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Batuah	Pembangunan Pasar Tradisional	Paket	2.000.000.000	Kecamatan
Pembangunan gedung Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Batuah	Pembangunan Lapangan Bola	Paket	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Batuah	Pengadaan Tiang dan Instalasi Listrik	Paket	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Batuah	Semenisasi Jalan Usaha Tani Gg. Mawar	300 M x 4 M x 0,20 M	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Tani Harapan	Perkerasan Jalan usaha Tani Mitra Lada RT 06 Dusun Harapan Jaya	300 M x 4 M x 0,20 M	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Tani Harapan	Perkerasan Jalan usaha Tani Mitra Lada RT 011 Dusun Tani Baru	300 M x 4 M x 0,20 M	200.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Tani Harapan	Pembangunan Parit Jalan RT 007 Dusun Haraopan Jaya	250 m	250.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Tani Harapan	Pembangunan Parit Jalan RT 001 Dusun Harapan Sejahtera	250 m	250.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Tani Harapan	Lanjutan Perkerasan Jalan Usaha Tani RT 003	300 M x 4 M x 0,20 M	200.000.000	Kecamatan

Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Tani Harapan	Lanjutan Semenisas jalan Tani Harapan - Air Panas Dusun Tani Baru Desa Tani Harapan	3000 M x 4 M x 0,20 M	30.000.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Tani Harapan	Pembangunan Parit Jalan Samping TK Harapan Sejahtera	250 m	250.000.000	Kecamatan
Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Desa Tani Harapan	Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Tani Harapan	100 Titik	1.000.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Tani Harapan	Turap Lokasi SDN 024 Loa Janan	30 m	200.000.000	Kecamatan
Pembangunan Saluran Drainase Desa/Kelurahan dengan Konstruksi Sederhana	Desa Tani Harapan	Turap Lokasi SDN 028 Loa Janan	100 M	10.000.000.000	Kecamatan
Pembangunan Sarana dan Prasana	Desa Tani Harapan	Rehab Total Puskesmas Pembantu Desa Tani Harapan	10 x 20	5.000.000.000	Kecamatan
Pembangunan Sarana dan Prasana	Desa Tani Harapan	Bantuan alsintan Untuk Gapoktan Desa Tani Harapan	10 Unit	1.000.000.000	Kecamatan
	Jl. Soekarno-Hatta Km 19 Desa Batuah	Rehab Berat SDN 010 Loa Janan	4 Ruang	1.000.000.000	Dinas Pendidikan
	Jl. Soekarno-Hatta Km 19 Desa Batuah	Pembangunan Pagar SDN 010 Loa Janan	150 m	250.000.000	Dinas Pendidikan
		Pembangunan Ruang Kelas Baru TK 01		200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Tani Harapan	Loa Janan	4 ruang		Dinas Pendidikan
	Desa Tani Harapan	Pembangunan WC TK 01 Loa Janan	4 ruang	200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Batuah	Pembangunan WC SDN 010 Loa Janan	4 ruang	200.000.000	Dinas Pendidikan

		Pembangunan Ruang Kelas Baru TK 02		200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Batuah	Loa Janan	4 ruang	200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Batuah	Pembangunan Wc TK 02 Loa Janan	4 Ruang	200.000.000	Dinas Pendidikan
		Pembangunan Pagar dan Gafura TK 02		200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Batuah	Loa Janan	125 m	200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Batuah	Rehab Berat SDN 018 Loa Janan	6 ruang	200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Batuah	Pembangunan WC SDN 018 Loa Janan	4 ruang	200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Batuah	Pavinisasi Halaman SDN 018 Loa Janan	50 m2	200.000.000	Dinas Pendidikan
		Pembangunan Ruang perpustakaan SDN 027		200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Batuah	Loa Janan	1 Ruang	200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Batuah	Pembangunan Ruang UKS SDN 027 Loa Janan	1 Ruang	200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Batuah	Pembangunan Pagar SDN 027 Loa Janan	150 m	200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Batuah	Pembangunan Kantin SDN 027 Loa Janan	1 ruang	200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Batuah	Pembangunan Kantin SDN 005 Loa Janan	1 Ruang	200.000.000	Dinas Pendidikan
		Pembangunan Pagar SDN 005 Loa Janan		200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Batuah	Lanjutan	150 m	200.000.000	Dinas Pendidikan
		Pembangunan Ruang perpustakaan SDN 015		200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Tani Bhakti	Loa Janan	1 Ruang	200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Tani Bhakti	Pembangunan Ruang UKS SDN 015 Loa Janan	1 ruang	200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Tani bhakti	Pembangunan pagar SDN 015 Loa Janan	200 m	200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Loa Janan Ulu	Pembagunan Kantin SDN 023 Loa Janan	1 ruang	200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Loa Janan Ulu	Pembangunan pagar SDN 023 Loa Janan	1 ruang	200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Purwajaya	Pembangunan Kantin SDN 002 Loa Janan	1 ruang	200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Loa duri Ilir	Pembangunan Kantin SDN 001 Loa Janan	1 ruang	200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Loa duri Ilir	Pembangunan Ruang UKS SDN 001 Loa Janan	1 ruang	200.000.000	Dinas Pendidikan

	Desa Loa duri Ilir	Rehab SDN 026 Loa Janan	8 ruang	200.000.000	Dinas Pendidikan
		Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 026		200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Loa Duri Ilir	Loa Janan	3 Ruang	200.000.000	Dinas Pendidikan
		Pembangunan Ruang Perpustakaan		200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Loa Duri Ilir	SDN 026 Loa Janan	1 ruang	200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Loa Duri Ilir	Pembangunan Pagar SDN 026 Loa Janan	200 m	200.000.000	Dinas Pendidikan
		Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 008		200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Loa duri Ilir	Loa Janan	1 Ruang	200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Loa duri Ilir	Rehab Berat SDN 008 Loa Janan	6 Ruang	200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Loa duri Ilir	Pembangunan Ruang UKS SDN 008 Loa Janan	1 Ruang	200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Loa Janan Ulu	Pembangunan WC SDN 023 Loa Janan	6 Ruang	200.000.000	Dinas Pendidikan
		Pembangunan Perpustakaan SDN 024		200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Tani Harapan	Loa Janan	1 ruang	200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Loa duri Ilir	Pembangunan WC SMP Negeri 1 Loa Janan	10 Ruang	200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Loa Duri Ilir	Rehab gedung SMPN 1 Loa Janan	12 ruang	200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Batuah	Rehab gedung SMPN 2 Loa Janan	4 ruang	2.000.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Bakungan	Pembangunan Pagar SDN 011 Loa Janan	200 m	200.000.000	Dinas Pendidikan
		Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 011		200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Bakungan	Loa Janan	3 ruang		Dinas Pendidikan
		Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 017		200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Bakungan	Loa Janan	3 ruang		Dinas Pendidikan
	Desa Bakungan	Pavinisasi Halaman SDN 007 Loa Janan	100 m2		Dinas Pendidikan
	Desa Bakungan	Rehab berat SDN 007 Loa Janan	6 Ruang	200.000.000	Dinas Pendidikan
		Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 007		200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Bakungan	Loa Janan	1 Ruang		Dinas Pendidikan

	Desa Bakungan	Pembagunan Ruang UKS SDN 007 Loa Janan	1 ruang	200.000.000	Dinas Pendidikan
		Pembangunan Pagar dan Gapura SDN		200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Bakungan	007 Loa Janan	200 m	200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Loa duri Ilir	Pembangunan Pagar SDN 008 Loa Janan	200 m	200.000.000	Dinas Pendidikan
		Pembangunan Pagar Keliling SMP N 2		200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Batuah	Loa Janan	300 m	200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Tani Harapan	Pemngunan Pagar SMPN 6 Loa Janan	250 m	200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Loa Janan Ulu	Rehab Atap dan flapon SDN 003 Loa Janan	6 ruang	200.000.000	Dinas Pendidikan
		Pembangunan Ruang laboraturium SMPN 4		200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Bakungan	Loa Janan	1 ruang		Dinas Pendidikan
		Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 4	1 Ruang	200.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Bakungan	Loa Janan	3 Ruang		Dinas Pendidikan
	Desa Bakungan	Pavinisasi Halaman SMPN 4 Loa Janan	20 m2	100.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Purwajaya	Rehap Berat Ruang Kelas SDN 002 Loa Janan	4 Ruang	1.000.000.000	Dinas Pendidikan
	Desa Loa Janan Ulu	Pelatihan Poktan (UPPKA, BKB, BKL, BKR)		72.955.000	DPPKB
	8 Desa	Pengadaan BKB Hi dan APE (8 Desa dengan total 12 BKB)	12 paket	90.000.000	DPPKB
	8 desa	Operasional kelompok BKB, bkl, bkr, pik r dan saka kencana serta forum duta genre kecamatan (8 Desa dalam 12 bulan - Rp. 300.000/bulan)		180.000.000	DPPKB
	8 Desa	Operasional Kelompok Kegiatan (8 DESA)		33.000.000	DPPKB
	Desa Loa Janan Ulu	Pelatihan pendidik sebaya/pik r/duta genre		19.910.000	DPPKB
	Desa Loa Janan Ulu	Pelatihan PPKBD dan SUB PPKBD		37.225.000	DPPKB
	8 desa	PelatihanKader Kampung KB, Dapur Sehat Atasi Stunting, Rumah Data Kependudukan (8 Desa)		62.300.000	DPPKB

	Desa Loa Janan Ulu	Pelaksanaan aksi remaja peduli cegah stunting sejak dini, ' anemia No, ' di sekolah		45.000.000	DPPKB
	Desa Loa Janan Ulu	Penyediaan Sarana dan Prasarana Intitusi Masyarakat Perdesaan dan Poktan		30.250.000	DPPKB
	Desa Loa Janan Ulu	Lomba duta Genre tingkat kecamatan 1 event	1 event	150.000.000	DPPKB
	Kecamatan Loa Janan	Pembangunan Geedung Sekretariat PKK Kecamatan Loa Janan	8 x 16 x 2 lt	1.200.000.000	PU Cipta Karya
	Kecamatan Loa Janan	Penyediaan Sarana dan Prasaran PKK Kecamatan Loa Janan	Paket	250.000.000	Kecamatan
	Kecamatan Loa Janan	Pelaksanaan BIMTEK PKK Kecamatan Loa janan	Paket	200.000.000	Kecamatan
	Kecamatan Loa Janan	Rehab Berat BPU Kecamatan Loa Janan		1.000.000.000	PU Cipta Karya

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Loa Janan Tahun Anggaran 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Loa Janan dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut

a) Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan

pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

b) Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana secara teknokratis prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, dimana kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan : *Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.*

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Loa Janan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD Kecamatan Loa Janan Tahun 2021-2026.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelummnya Kecamatan Kembang Janggut mempunyai tujuan yaitu "*Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel",* yang artinya Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan,

profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah. Meningkatkan sarana infrastruktur sebagai akses masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan partisipasi masyarakat / perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbangcam, meningkatkan kelancaran proses administrasi kependudukan dan meningkatkan keamanan lingkungan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu "*Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan*", yang artinya meningkatnya tertib administrasi pemerintah dan kualitas pelayanan publik dan meningkatnya Interkoneksitas antar wilayah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Kecamatan mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusanpelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraantugas-tugas umum pemerintahan. Kecamatan juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memilikidaerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umumpemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidangkoordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan,penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang -undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, sertapelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahandesadan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Kecamatan sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan denganperangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untukmendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatukewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio ku ltural, menciptakan stabilitas dalamdinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman danketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalamkerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camatselain mernberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugaspembinaan wilayah.

Kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek saranaprasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalamupaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahankewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaankegiatan pemerintahan kabupaten.

Kebijakan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan urusan kewenangan yang dilimpahkan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN LOA JANANKAB. KUTAI KARTANEGARA

TAHUN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	16	17
		Kecamatan Loa Janan						12.651.982.282,00				2.629.792.696,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						12.626.982.282,00				2.629.792.696,00	
	7	KECAMATAN						12.626.982.282,00				2.629.792.696,00	
1	7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.565.982.282,00				1.551.609.406,00	

	7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	605.000.000,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	296.885.086,00	
	7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	140.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata	30.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN

											Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
	7	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	0,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	0,00	KECAMATAN LOA JANAN

											Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	266.885.086,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah											
			0				200 0	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata	0,00	KECAMATAN LOA JANAN

											Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
	7	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25 Berita Acara	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0,00	KECAMATAN LOA JANAN

	7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.637.692.962,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	125.000.000,00	
	7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				402 Orang/bulan	4.532.692.962,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,	0,00	KECAMATAN LOA JANAN

											produktif, terampil		
	7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	100.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	25.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	0,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	277.060.000,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan	55.000.000,00	

											pelayanan publik Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil		
	7	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	0,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD											

			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	0,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD											
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintaha	0,00	KECAMATAN LOA JANAN

											n dan Pelayanan Publik		
	7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	52.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	55.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN

	7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	232.789.050,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	232.789.050,00	
	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.997.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Pengembangan sumber daya manusia	7.997.700,00	KECAMATAN LOA JANAN

											yang sehat, produktif, terampil		
	7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	40.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	38.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	38.060.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.871.350,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,	10.871.350,00	KECAMATAN LOA JANAN

											produktif, terampil		
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	85.860.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	85.860.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											

			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	50.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	480.488.556,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	380.488.556,00	

	7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	128.843.220,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	28.843.220,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	10.350.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Pengembangan sumber daya manusia	10.350.000,00	KECAMATAN LOA JANAN

											yang sehat, produktif, terampil		
	7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	341.295.336,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Janan Ulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja	341.295.336,00	KECAMATAN LOA JANAN

	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	332.951.714,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	461.446.714,00	
	7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,	0,00	KECAMATAN LOA JANAN

											produktif, terampil		
	7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	228.495.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	232.951.714,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	232.951.714,00	KECAMATAN LOA JANAN
2	7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	5.030.000.000,00				621.628.190,00	
	7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	400.000.000,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Pengembang	0,00	

											an sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil		
	7	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	0,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											

			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	100.000.000,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,	100.000.000,00	

											produktif, terampil		
	7	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	100.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN

	7	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	4.530.000.000,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	521.628.190,00	
	7	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan											
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				509 Laporan	580.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata	118.712.900,00	KECAMATAN LOA JANAN

											Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
	7	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				20 Laporan	3.950.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	402.915.290,00	KECAMATAN LOA JANAN
3	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	586.000.000,00				456.555.100,00	
	7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	100.000.000,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Pengembangan sumber	456.555.100,00	

											daya manusia yang sehat, produktif, terampil		
	7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	56.555.100,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											

			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	400.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	486.000.000,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	0,00	
	7	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan											

			0				5 0	486.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	0,00	KECAMATAN LOA JANAN
4	7	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	215.000.000,00				0,00	
	7	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	215.000.000,00			Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0,00	
	7	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	175.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0,00	KECAMATAN LOA JANAN
5	7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	230.000.000,00				0,00	
	7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	230.000.000,00			-	0,00	
	7	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional											

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	180.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	0,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan											
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	0,00	KECAMATAN LOA JANAN
	X	NON URUSAN						25.000.000,00				0,00	
	X	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						25.000.000,00				0,00	
6	X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	25.000.000,00				0,00	

	X	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	25.000.000,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0,00	
	X	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata	0,00	KECAMATAN LOA JANAN

											Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
	J U M L A H							12.651.982.282,00				2.629.792.696,00	

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan Loa Janan Tahun 2023 mengacu kepada petunjuk pelaksaan dan ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Fungsi atributif dan distributif tersebut meliputi banyak sektor kegiatan. Dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan dapat memerankan diri dengan pendekatan “kewilayahan”, seperti wilayah kecamatan, desa, dan dusun; dan juga dengan pendekatan “sektoral”, seperti sektor pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, ketertiban umum, dan pemberdayaan perempuan. Selama ini pelaksanaan otonomi daerah pemerintah terbelenggu pendekatan sektoral dan gagal memberdayakan camat sebagai ujung tombak kembar strategi pemerintahan sektoral maupun pendekatan kewilayahan.

Fungsi sektoral kecamatan melalui sekretariat dan 5 seksi yang ada dalam struktur organisasinya maka peran kecamatan semestinya tidak sekedar berbasis kewilayahan sebab Kecamatan sebenarnya telah menjadi perangkat daerah bukanlah perangkat wilayah. Kecamatan semestinya mengedepankan fungsi sektoral. Fungsi sektoral ini menjadikan para Kepala Seksi di Kecamatan dapat memerankan fungsinya secara optimal. Bila 5 seksi dalam organisasi Kecamatan dapat berperan aktif dan kreatif maka akan dicapai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien.

Dengan melihat posisi dan fungsi Kecamatan diatas maka Kecamatan semestinya memiliki peran dan fungsi strategis untuk mensukseskan penyelenggaraan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan keunikan melalui kombinasi pendekatan kewilayahan dan sektoral maka Kecamatan apabila didukung kebijakan, personil, anggaran dan peralatan yang memadahi maka Kecamatan akan menjadi organisasi terdepan dalam mengelola masyarakat beserta sumberdaya yang ada guna percepatan pencapaian MDGs.

Masalah krusial dari belum optimalnya fungsi atributif dan delegatif adalah kebijakan anggaran yang masih memposisikan Kecamatan sebagai organisasi pelengkap bukan utama. Hal ini dari proses pengusulan anggaran sampai dengan pelaksanaannya Kecamatan mendapatkan platform anggaran yang minim dan dengan sistem pengaggaran pola penyeragaman dengan kurang memperhatikan keanekaragaman dan keunikan setiap wilayah kecamatan

padahal setiap wilayah kecamatan memiliki perbedaan dan keunggulan masing masing yang sudah tentu pengembangan kecamatan mengunakan pola pendekatan dan strategi yang berbeda.

Peningkatan kuantitas/jumlah pegawai kecamatan dengan menempatkan pegawai yang ada di SKPD lainnya yang memiliki kualifikasi sebagai jabatan fungsional untuk ditempatkan di Kecamatan. Selama ini di SOTK Kecamatan ada jabatan fungsional namun belum pernah dimanfaatkan. Sementara itu untuk mendukung tugas dan fungsinya khususnya pelaksanaan Paten harus di dukung kelayakan teknis maka tidak pelak lagi perlunya pendistribusian tim teknis yang berkualifikasi untuk ditempatkan di kecmatan sebagai jabatan fungsional.

Peningkatan kualitas pegawai di Kecamatan. Selama ini pegawai Kecamatan jarang diikutsertakan dalam berbagai pengembangan sumberdaya manusia yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten, bahkan ada kecenderungan orang kabupaten merasa pintar dan mampu, di internal organisasi sendiri jarang dilaksanakan pengembangan SDM pegawai kecamatan. Untuk mendukung pengembangan SDM Kecamatan ke depan maka perlu diagendakan adanya pengembangan SDM Kecamatan berbasis tugas pokok dan fungsinya, sehingga para Kasi Kecamatan bisa memerankan dirinya sebagai PPTK yang handal. Sebab selama ini para Kasi Kecamatan belum secara riil dimanfaatkan dan mampu menjadi PPTK Kegiatan.

Untuk mendukung optimalisasi fungsi atributif dan delegatif adalah kebijakan anggaran yang proposial sesuai dengan beban kerja dan kondisi wilayah serta target capaian pengembangan wilayah. Untuk hal tersebut perlu dipersiapkan langkah sebagai berikut :

a. Perencanaan anggaran : perencanaan anggaran Kecamatan semestinya berbasis tugas pokok dan fungsinya. Artinya setiap pelaksanaan fungsi organisasi harus dirancang kegiatannya secara struktur dengan pembiayaan yang memadai. Selama ini Kecamatan hanya memiliki 2 program kegiatan yaitu program administrasi perkantoran dan sarana prasarana perkantoran, semestinya ke depan perlu disusun rencana kergiatan anggaran berbasis PPTK artinya masing masing pejabat struktural memiliki rencana kerja yang nyata sesuai dengan kebutuhan yang ada yang perlu didanai. Hal ini penting sebab setelah menjadi perangkat daerah bukan kepala wilayah maka yang dikedepankan dari fungsi kecamatan bukan fungsi kewilayahan namun fungsi sektoral sesuai dengan sektor/bidang tugas masing masing pejabat struktural.

b. Pelaksanaan anggaran : dalam pelaksanaan anggaran kecamatan diupayakan sedemikian rupa menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dimana aspek visoner, tranparansi, partisipasi, akuntabel, efektif dan efisien menjadi arah dari pelaksanaan kegiatan. Ini penting sebab selama ini seakan yang mengelola kegiatan hanya pengguna anggaran dan bendahara, sementara fungsi PA dan PPTK belum optimalkan secara nyata. Secara logika pekerjaan besar bila melibatkan kekuatan besar akan berhasil.

c. Evaluasi anggaran. Yang tidak kalah penting adalah evaluasi pelaksanaan anggaran, dimana setiap anggaran belanja daerah semestinya berbasis kinerja dengan tolok ukur penilaian bukan hanya *output* namun juga *outcame* bahkan samapai kepada dampak dari kegiatan. Semestinya Lakip yang saat ini digunakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pemerintahan seakan hanya formalitas, maka kedepan Lakip diharapkan benar benar menjadi alat ukur untuk mengetahui dampak sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.

Maksud dan Tujuan Rencana Kinerja SKPD ditetapkan agar pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pada Kantor Kecamatan Loa janan adalah agar para aparaturnya dapat melaksanakan kegiatan dan fungsi pokok dalam proses penyelesaian tugas jabatan, dan petunjuk mekanisme kerja dari setiap lembaga pemerintah yang harus dilaksanakan oleh setiap aparaturnya. Sedangkan tujuannya untuk meningkatkan produktifitas kerja bagi aparatur pejabat struktural yang dibebankan guna memaksimalkan pencapaian program kerja sesuai spesifikasi secara berkualitas dan memuaskan.

Akhirnya kesamaan Visi dan Misi yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Kecamatan Loa Janan dapat menjadi acuan pemerintah khususnya Pemerintah Kecamatan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah.

rr.RENJA KECAMATAN MUARA KAMAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap Penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Renja SKPD Kecamatan Muara Kaman Kutai Kartanegara merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Penyusunan Renja Kecamatan Muara Kaman Tahun Rencana 2025 melalui proses Teknokratik, Politik, Partisipatif dan Top Down – Bottom Up dan secara Substansi bersifat Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial serta mengacu pada pendekatan " Money Folllow Program" berbasis tugas dan fungsi Keccamatan Muara Kaman serta visi dan Misi Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah :

1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9 Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10 Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

15 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

16 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3 Maksud dan tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan RENJA Kecamatan Muara Kaman Tahun Rencana 2025 dimaksudkan sebagai panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Muara Kaman Tahun Rencana 2025.

1.3.2 Tujuan

Sedangakan tujuan disusunnya RENJA Kecamatan Muara Kaman Tahun Rencana 2025 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Rencana 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan RENJA Kecamatan Muara Kaman Tahun Rencana 2025 meliputi:

BAB I. PENDAHULUAN,

berisi tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU,

berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKKAT DAERAH,

berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran OPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,

berisi tentang : Program dan Kegiatan.

BAB V. PENUTUP.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA MUARA KAMAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Muara Kaman Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026.

Pelaksanaan evaluasi Renja Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran. Renja Kecamatan Muara Kaman Tahun 2023 memuat 6 Program, 15 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dengan jumlah pagu Rp47.210.520.581,49,-. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan dalam renja Kecamatan Muara Kaman 2023 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Keuangan sebesar Rp45,616,198,558,- atau 96,62%. SILPA sebesar Rp.1,594,322,023,-
2. Realisasi Fisik Kegiatan rata-rata mencapai 99%.

   Realisasi kinerja keuangan per Program disajikan dalam tabel 2.1 di bawah :

Gambar 2.1 Realisasi Keuangan berdasarkan Program

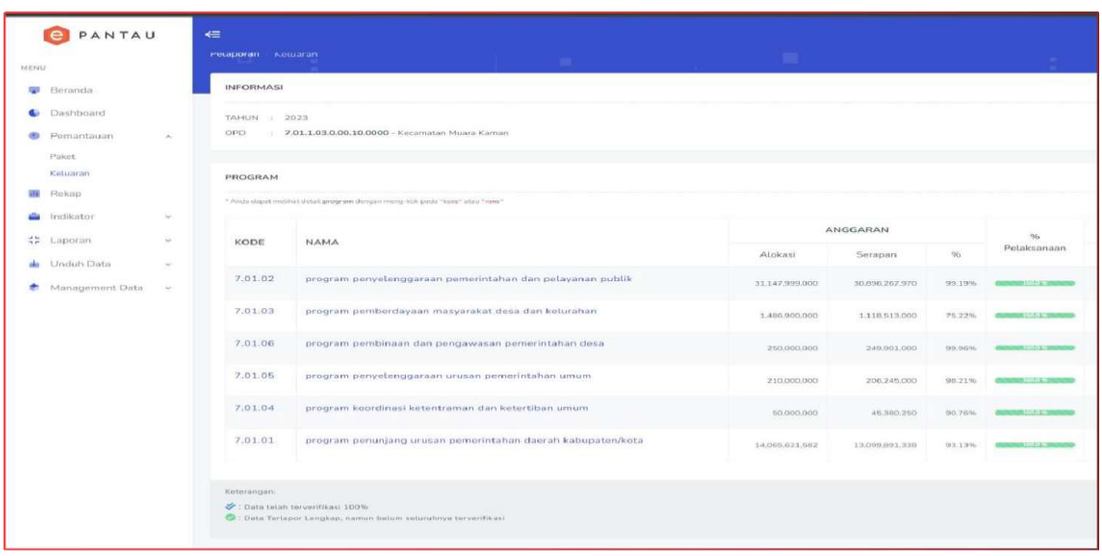

Capaian kinerja tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2023 cukup baik, namun demikian masih terdapat SILPA. Terdapat beberapa persoalan yang dapat diidentifikasi sebagai factor penyebab adanya silpa Kecamatan Muara Kaman, seperti tidak terealisasinya pelaksanaan 1 (satu) sub kegiatan dan 3 (tiga) Paket pekerjaan, serta juga ketidak cermatan dalam pengalokasian gaji dan tunjangan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel TC.29 :

Tabel TC.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Muara Kaman Dan

Pencapaian Renstra Keccamatan Muara Kaman S/D Tahun 2023 Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN									
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	67 Nilai	70 Nilai	70 Nilai	100	75 Nilai	Nilai 75	88.2
7	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	80	4 Dokumen	Dokumen 14	46.7
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	60.0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Perangkat Daerah									
7	1	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	40.0
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50	1 Laporan	4 Laporan	40.0
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	61 Laporan	13 Laporan	19 Laporan	13 Laporan	68	13 Laporan	39 Laporan	63.9
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/Bulan	61 Orang/Bulan	61 Orang/Bulan	61 Orang/Bulan	100	61 Orang/Bulan	61 Orang/Bulan	100.0
7	1	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	60 Laporan	12 Laporan	18 Laporan	12 Laporan	67	12 Laporan	36 Laporan	60.0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
7	1	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	800 Unit	540 Unit	580 Unit	639 Unit	110	640 Unit	640 Unit	80.0
7	1	1	02.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	2 Laporan	5 Laporan	50.0
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian	- Layanan	- Layanan	2 Layanan	2 Layanan	100	- Layanan	2 Layanan	#DIV/0!
7	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Paket	- Paket	2 Paket	2 Paket	100	- Paket	2 Paket	#DIV/0!
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	35 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100	7 Kegiatan	21 Kegiatan	60.0
7	1	1	02.	2	Penyediaan	Jumlah Paket Peralatan	50 Paket	21 Paket	10 Paket	9 Paket	90	1 Paket	Paket	62.0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			06		Peralatan dan Perlengkapan Kantor	dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							31	
7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	2 Paket	13 Paket	13 Paket	100	2 Paket	17 Paket	68.0
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	2 Paket	3 Paket	3 Paket	100	1 Paket	6 Paket	24.0
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	5 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	7 Paket	28.0
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	4 Laporan	28 Laporan	46.7
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	50 Laporan	70 Laporan	120 Laporan	171	35 Laporan	205 Laporan	68.3
7	1	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60.0
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	8 Unit	2 Unit	127 Unit	127 Unit	100	- Unit	129 Unit	1612.5

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Pemerintah Daerah	Daerah yang disediakan								
7	1	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Unit	- Unit	11 Unit	11 Unit	100	- Unit	11 Unit	#DIV/0!
7	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Unit	- Unit	3 Unit	3 Unit	100	- Unit	3 Unit	#DIV/0!
7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Paket	- Paket	2 Paket	2 Paket	100	- Paket	2 Paket	#DIV/0!
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	2 Unit	4 Unit	4 Unit	100	- Unit	6 Unit	75.0
7	1	1	02.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Unit	- Unit	4 Unit	4 Unit	100	- Unit	4 Unit	#DIV/0!
7	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Unit	- Unit	103 Unit	103 Unit	100	- Unit	103 Unit	#DIV/0!
7	1	1	02.		Penyediaan Jasa	Jumlah Waktu	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	Bulan	60.0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			08		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							36	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	7 Laporan	9 Laporan	180.0
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	36 Laporan	60.0
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60.0
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	36 Laporan	60.0
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	93 Unit	7 Unit	31 Unit	31 Unit	100	33 Unit	71 Unit	76.3

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	3 Unit	4 Unit	4 Unit	100	16 Unit	Unit 23	95.8
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	3 Unit	22 Unit	22 Unit	100	10 Unit	Unit 35	58.3
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	- Unit	4 Unit	4 Unit	100	- Unit	4 Unit	80.0
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	7 Unit	9 Unit	225.0
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang	90 Persen	58 Persen	60 Persen	60 Persen	100	70 Persen	Persen 70	77.8

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	dilaksanakan sesuai SOP								
						Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	90 Persen	38 Persen	60 Persen	60 Persen	100	70 Persen	Persen 70	77.8
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	18 SP	1 SP	3 SP	2 SP	67	- SP	3 SP	16.7
7	1	2	02.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	18 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50	- Laporan	2 Laporan	11.1
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Laporan	- Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	- Laporan	1 Laporan	#DIV/0!

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Wilayah Kecamatan									
7	1	2	02.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	- Unit	2 Unit	40.0
7	1	2	02.03	2	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	- Unit	2 Unit	40.0
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	3,164 Kegiatan	51 Kegiatan	168 Kegiatan	168 Kegiatan	100	102 Kegiatan	321 Kegiatan	10.1
7	1	2	02.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	45 Laporan	1 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	100	2 Laporan	12 Laporan	26.7
7	1	2	02.	3	Pelaksanaan	Jumlah Laporan	164 Laporan	50 Laporan	Laporan	Laporan	159	Laporan	Laporan	188.4

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			04		Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			100	159		100	309	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif	100 Persen	78 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100.0
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	500 Koordinasi	100 Koordinasi	100 Koordinasi	50 Koordinasi	50	4 Koordinasi	154 Koordinasi	30.8
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50 Lembaga	6 Lembaga	10 Lembaga	6 Lembaga	60	- Lembaga	12 Lembaga	24.0
7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	35 Laporan	4 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100	4 Laporan	15 Laporan	42.9

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi	100 Persen	75 Persen	100 Persen	100 Persen	100	- Persen	100 Persen	100.0
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	- Kegiatan	6 Kegiatan	37.5
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	- Laporan	2 Laporan	40.0
7	1	4	02.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	- Laporan	4 Laporan	40.0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 Persen	75 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100.0
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	10 Urusan	2 Urusan	2 Urusan	2 Urusan	100	2 Urusan	6 Urusan	60.0
7	1	5	02.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1,000 Orang	100 Orang	200 Orang	100 Orang	50	200 Orang	400 Orang	40.0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	1	5	02.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2 Dokumen	4 Dokumen	80.0
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	75 Persen	40 Persen	45 Persen	45 Persen	100	55 Persen	55 Persen	73.3
7	1	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	20 Desa	20 Desa	20 Desa	20 Desa	100	- Desa	20 Desa	100.0
7	1	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100 Dokumen	20 Dokumen	40 Dokumen	20 Dokumen	50	- Dokumen	40 Dokumen	40.0
7	1	6	02.01	17	Koordinasi Pendampingan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	100 Laporan	- Laporan	20 Laporan	20 Laporan	100	- Laporan	20 Laporan	20.0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Desa di Wilayahnya	Pendampingan Desa di Wilayahnya								

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Kecamatan Muara Kaman Kutai Kartanegara Tahun 2023 disampaikan bahwa Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja Kecamatan Muara KamanTahun Anggaran 2023 cukup baik, namun diharapkan kedepannya bagi sub kegiatan yang belum atau kurang mendapatkan alokasi anggaran (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Non Urusan/Generik) dapat menjadi perhatian secara bersama dalam pengalokasian ataupun penambahan anggaran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Muara Kaman Kutai Kartanegara menyelenggarakan urusan Unsur Kewilayahan Bidang urusan Kecamatan, penyelenggaran pembangunan Kecamatan Muara Kaman seperti yang tertuang dalam Renja Tahun 2023, memberi dampak positif terhadap pencapaian target kinerja yang ditetapkan yaitu “Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan” diukur dari 4 (empat) indikator kinerja:

1) Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti,
2) Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum
3) Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa
4) Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan

Capaian kinerja pada indikator Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti mencapai 100% dari target 85 persen jumlah keluhan yang ditindaklanjuti. Sesuai dengan Skala nilai peringkat kinerja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menunjukkan nilai “Sangat Tinggi”, .Angka capaian kinerja didasarkan pada data penyelenggaraan PATEN Kecamatan Muara Kaman periode Januari sampai desember 2023, dimana tidak terdapat keluhan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan di kecamatan muara kaman. Penegasan tidak adanya keluhan terhadadp layanan publik kecamatan muara kaman tercermin dalam Surat Pernyataan CAMAT Muara Kaman Nomor : B. 406/Kec. MK/Pelum.600/2/2024 tanggal 21 Februari 2024.

Gambar 2.2

Surat pernyataan Camat tidak adanya keluhan terhadap layanan publik.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA KAMAN
Alamat :Jln. MulawarmanNomor : 1 Telp. (0541) `..... KodePos 75553
MUARA KAMAN

SURAT PERNYATAAN
Nomor : B. 406/Kec. MK/Pelum.600/2/2024

Yang bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Barliang, S.Sos
Jabatan : Camat Muara Kaman
Instansi : Kantor Camat Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat : Jln. Mulawarman No.01 Muara Kaman

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Instansi Kantor Camat Muara Kaman tidak ada menerima keluhan masyarakat dalam Pelayanan PATEN yang ditindaklanjuti selama priode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya dan dapat di pergunakan sebagai mestinya.

Dibuat di : Muara Kaman
Pada Tanggal : 21 Pebruari 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
CAMAT MUARA KAMAN

HJ. BARLIANG,S.Sos
Pembina IV/a

Angka capaian ini relatif sama dengan capaian pada periode tahun 2022 yang juga mencapai 100 persen. Hal ini mengindikasikan 2 kemungkinan, bahwa pelayanan publik di kecamatan muara kaman terselenggara dengan baik atau masyarakat yang mengakses layanan apatis dalam memberikan penilaian. Untuk menjaga kualitas layanan pada periode yang akan datang, diperlukan langkah kongkrit agar masyarakat lebih aktif berpartisipasi memberikan masukan dan koreksi terhadap setiap jasa layanan di kecamatan muara kaman, sehingga pengukuran capaian kinerja menjadi lebih objektif dan berkualitas.

Capaian kinerja pada indikator sasaran ke dua : Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada tabel 3.2. mencapai 100 persen menunjukkan nilai “Sangat Tinggi”. Data capaian didasarkan pada persentase jumlah kasus yang menggangu ketentraman dan ketertiban umum diselesasikan dari total jumlah kasus yang terjadi pada periode januari sampai desember 2023. Berdasarkan laporan hasil koordinasi dengan instansi vertikal beserta tokoh masyarakat dan tokoh agama, tidak terdapat kasus yang menggangu

ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan muara kaman. Terselenggaranya koordinasi dengan instansi vertikal (Kepolisian dan TNI), tokoh agama dan tokoh masyarakat serta perangkat desa lingkup kecamatan muara kaman menjadi kunci keberhasilan pencapaian ini.

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga memberi andil dalam pencapaian ini. Capaian ini mengindikasikan kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang semakin baik, Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, dimana terdapat satu kasus yang dianggap menggangu ketentraman dan ketertiban umum. Untuk masa yang akan datang, Kecamatan muara kaman optimis dapat meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan mengoptimalkan koordinasi dan edukasi.

Capaian kinerja pada indikator sasaran ke tiga : Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa 1 persen, jauh dibawa target sebesar 100 persen. Dari nilai Pendapatan Asli Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 1.112.529.503,75, hanya terealisasi sebesar Rp. Rp. 1.112.529.503,75,-. Merujuk pada skala nilai peringkat kinerja, masuk kategori “sangat rendah”. Berdasarkan informasi dari perangkat desa, pengelompokan terhadap jenis Pendapatan Desa berdampak pada penerimaan PADes. Pemerintah Kecamatan Muara Kaman melalui seksi PMD melakukan mediasi dan koordinasi guna mendorong percepatan peningkatan pendapatan asli desa.

Tabel 2.2 PADes Kecamatan Muara Kaman

RINGKASAN LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KECAMATAN MUARA KAMAN TAHUN ANGGARAN 2022

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	**PENDAPATAN**			
1.1.	**Pendapatan Asli Desa**	**1.112.529.503,75**	**962.529.503,75**	**150.000.000,00**
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	31.091.945,00	31.091.945,00	0,00
1.1.2.	Hasil Aset Desa	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00
1.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	1.000.000.000,00	850.000.000,00	150.000.000,00
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	56.937.558,75	56.937.558,75	0,00
1.2.	**Pendapatan Transfer**	**58.354.973.300,00**	**41.884.926.576,00**	**16.470.046.724,00**
1.2.1.	Dana Desa	17.590.461.000,00	14.116.612.079,00	3.473.848.921,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	1.163.598.000,00	445.370.720,00	718.227.280,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	26.943.866.800,00	18.500.999.777,00	8.442.867.023,00
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	900.000.000,00	500.000.000,00	400.000.000,00
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	11.757.047.500,00	8.321.944.000,00	3.435.103.500,00
1.3.	**Pendapatan Lain-lain**	**189.102.066,30**	**189.527.728,66**	**(425.662,36)**
1.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumn	188.403.117,00	188.403.117,00	0,00
1.3.6.	Bunga Bank	698.949,30	1.124.611,66	(425.662,36)
	JUMLAH PENDAPATAN	**59.656.604.870,05**	**43.036.983.808,41**	**16.619.621.061,64**

Sumber : Aplikasi Siskeudes

Capaian kinerja pada indikator sasaran ke empat : Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan 0 Persen artinya tidak ada realiasi. Angka realisasi ini tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, melainkan tidak tersedianya data realisasi PAD di kecamatan muara kaman. Keadaan ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi dengan perangkat desa di Kecamatan Muara Kaman, serta juga kebijakan terhadadp kewenangan untuk melakukan pungutan terhadap objek PAD tertentu. Pada masa yang akan datang diperlukan penguatan koordinasi agar PAD dari kecamatan muara kaman dapat dilaporkan

Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel TC.30 berikut ini :

Tabel TC.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
Indikator Tujuan												
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan			83,77	86,87	86,97	87,07	87,17	85	85	86,97	Realisasi capaian tahun 2024 Merupakan Angka Proyeksi Optimis.
Indikator Sasaran												
2	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			80	85	90	95	100	75	75	90	
3	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			80	85	90	95	100	80	80	90	
4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa			100	100	100	100	100	35	35	100	
5	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan			100	100	100	100	100	0	0	0	Data Tidak Tersedia, Pungutan PAD Bukan Kewenangan Kecamatan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Muara Kaman.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 - 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu :

1. Implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh;
2. Peningkatan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Percepatan penanganan dan penanggulangan COVID-19 dan pemulihan dampaknya
4. Pengembangan perekonomian berkelanjutan
5. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)
6. Pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar untuk penguatan wilayah
7. Transformasi dan percepatan pembangunan desa dan kecamatan

Berdasarkan isu strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026 tersebut di atas, serta hasil analisis terhadap masalah yang timbul dari tahun – tahun sebelumnya maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi :

1. Keterjangkauan dan Kemudahan Akses Pelayanan Publik;
2. Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

3. Tata kelola Pemerintahan Desa;
4. Kapasitas SDM;
5. Konektifitas dan Kesenjangan antar wilayah;
6. Kemiskinan;

Isu Strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD

Rancangan awal RKPD / Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan melaui analisis dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Kecamatan Muara Kaman, Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2021-2026 serta urusan Unsur Kewilayahan yang diselenggarakan Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kaman. fungsi dan tugas Kecamatan Muara Kaman terkait erat dengan pencapaian misi ke 1 yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani, ke-2 yaitu Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya, dan Misi ke 4 yaitu Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD dapat dilihat pada Tabel TC.31.

Tabel TC.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
7	UNSUR KEWILAYAHAN						UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN					13,652,389,217	KECAMATAN					50,988,523,691	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Muara Kaman	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Angka	7,472,389,217	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Muara Kaman	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Angka	13,913,523,691	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Muara Kaman	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14	Dokumen	100,000,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Muara Kaman	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	Dokumen	390,000,000	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Muara Kaman	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	50,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Muara Kaman	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	200,000,000	Penambahan Anggaran, menyesuaikan dengan penambahan kinerja (Dokumen Renstra).
	Dokumen Renja 2026 Kec. Muara Kaman					*25,000,000*	*Dokumen Renja 2026 Kec. Muara Kaman*					*50,000,000*	
	Dokumen Perubahan Renja 2025 Kec. Muara Kaman					*25,000,000*	*Dokumen Perubahan Renja 2025 Kec. Muara Kaman*					*50,000,000*	
	-					-	*Dokumen Renstra 2025-2030*					*100,000,000*	
	-	-	-	-	-	-	Sub Kegiatan Koordinasi dan	Kec. Muara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1	Dokumen	15,000,000	Sub Kegiatan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
							Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kaman	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.				diperlukan untuk memfasilitasi penyusunan RKA.
						-	*Dokumen RKA 2026 Kec. Muara Kaman*					*15,000,000*	
	-	-	-	-	-	-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Muara Kaman	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	1	Dokumen	*15,000,000*	Sub Kegiatan diperlukan untuk memfasilitasi penyusunan Perubahan RKA.
						-	*Dokumen Perubahan RKA 2025 Kec. Muara Kaman*					*15,000,000*	
	-	-	-	-	-	-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Muara Kaman	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.	1	Dokumen	10,000,000	Sub Kegiatan diperlukan untuk memfasilitasi penyusunan DPA.
						-	*Dokumen DPA 2026 Kec. Muara Kaman*					*10,000,000*	
1.1 .2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Muara Kaman	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	Dokumen	10,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Muara Kaman	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	Dokumen	10,000,000	Diperlukan dalam memfasilitasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
			Perubahan DPA-SKPD.						Perubahan DPA-SKPD.				
	Dokumen Perubahan DPA 2025 Kec. Muara Kaman					*10,000,000*	*Dokumen Perubahan DPA 2025 Kec. Muara Kaman*					*10,000,000*	
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Muara Kaman	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	40,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Muara Kaman	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	40,000,000	Mendukung pencapaian kinerja SAKIP Kec. Muara Kaman
	Laporan Capaian Kinerja Kec. Muara Kaman					*40,000,000*	*Laporan Capaian Kinerja Kec. Muara Kaman*					*40,000,000*	
	-		-	-	-	-	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	100,000,000	Sub Kegiatan diperlukan untuk Evaluasi Pelaksanaan Renstra, sebagai bahan penyusunan Renstra 2025-2030.
						-	*Dokumen Evaluasi Kinerja*					*100,000,000*	
1.2	Kegiatan Administrasi	Kec. Muara	Jumlah laporan Administrasi	19	Laporan	5,728,196,	Kegiatan Administrasi	Kec. Muara	Jumlah laporan Administrasi	25	Laporan	8,809,773,	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	Keuangan Perangkat Daerah	Kaman	Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			364	Keuangan Perangkat Daerah	Kaman	Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			691	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Muara Kaman	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61	Orang/Bulan	5,636,391,964	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Muara Kaman	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61	Orang/Bulan	8,549,773,691	Penambahan pagu menyeseuaikan dengan pagu N-1
	Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Muara Kaman					*5,636,391,964*	*Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Muara Kaman*					*8,549,773,691*	
	-		-	-	-	-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Muara Kaman	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	1	Laporan	10,000,000	Diperlukan dalam memfasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan.
						-	*Laporan Keuangan Akhir Tahun 2025 Kec. Muara Kaman*					*10,000,000*	
1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Muara Kaman	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /	6	Laporan	91,804,400	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Muara Kaman	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /	12	Laporan	250,000,000	Penambahan Alokasi Anggaran, tersedia hanya untuk pembayaran honor pengelola keuangan selama 6 Bulan.

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
			Triwulanan / Semesteran SKPD						Triwulanan / Semesteran SKPD				
	Laporan Keuangan Bulanan Kec. Muara Kaman					*91,804,400*	*Laporan Keuangan Bulanan Kec. Muara Kaman*					*250,000,000*	
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Muara Kaman	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	639	Unit	41,400,000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Muara Kaman	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	639	Unit	195,000,000	
	-		-			-	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Muara Kaman	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	20,000,000	Diperlukan dalam upaya penataan aset.
						-	*Dokumen RKBMD Kec. Muara Kaman*					*20,000,000*	
	-		-			-	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Muara Kaman	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	150,000,000	Diperlukan dalam upaya penataan aset.
						-	*Pengamanan Aset Kec. Muara Kaman.*					*150,000,000*	
1.3.1	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Muara Kaman	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	41,400,000	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Muara Kaman	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	25,000,000	Penyesuaian anggaran (Penguranga n) berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
	Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Kec. Muara Kaman Semester 1					*20,700,000*	*Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Kec. Muara Kaman Semester 1*					*12,500,000*	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Kec. Muara Kaman Semester 2					*20,700,000*	*Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Kec. Muara Kaman Semester 2*					*12,500,000*	
	-		-			-	Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Muara Kaman	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian.	4	Layanan	450,000,000	
	-		-			-	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Muara Kaman	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	1	Paket	200,000,000	Belum pernah ada pengadaan pakaian miskat di Kantor Kec. Muara Kaman.
						-	*Pakaian Miskat*					*200,000,000*	
	-		-			-	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Muara Kaman	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	50,000,000	Paket Usulan Baru dalam rangka mengadministrasi (Update) data kepegawaian berdasarkan mekanisme dan format terbaru.
						-	*Dokumen Kepegawaian*					*50,000,000*	
	-		-			-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec. Muara Kaman	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian.	1	Dokumen	50,000,000	Diperlukan dalam upaya perbaikan kinerja ASN.

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
						-	*Dokumen Pelaksanaan Sistim Informasi Kepegawaian.*					*50,000,000*	
	-		-			-	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Dokumen	50,000,000	Diperlukan dalam upaya meningkatkan kinerja ASN.
						-	*Dokumen Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai*					*50,000,000*	
	-		-			-	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Muara Kaman	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.	20	Orang.	100,000,000	Diperlukan dalam upaya memenuhi target pelatihan ASN Minimal 20 Jam/Tahun.
						-	*Pendidikan dan Pelatihan ASN Kec. Muara Kaman*					*100,000,000*	
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Muara Kaman	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia.	7	Kegiatan	236,794,798	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Muara Kaman	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	15	Unit	1,353,750,000	
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Muara Kaman	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	50,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Muara Kaman	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	800,000,000	Sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan optimaliasasi kegiatan Kecamatan
	Paket PC					*50,000,000*	*Paket Video Wall*					800,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
													Muara Kaman.
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Muara Kaman	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	12,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Muara Kaman	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	Paket	-	Penyesuaian (Penghapusan) anggaran, Peralatan rumah tangga Kantor camatan memadai.
	Paket Peralatan Rumah Tangga					*12,000,000.00*	*Paket Peralatan Rumah Tangga*					-	
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Muara Kaman	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	33,750,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Muara Kaman	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	33,750,000	Sesaui Perencanaan Awal
	Paket ATK					*31,750,000*	*Paket ATK*					*31,750,000*	
	Paket Alat Kebersihan Kantor					*2,000,000*	*Paket Alat Kebersihan Kantor*					*2,000,000*	
1.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Muara Kaman	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	20,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Muara Kaman	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	20,000,000	Sesaui Perencanaan Awal
	Paket Barang Cetakan dan Penggandaan					*20,000,000*	*Paket Barang Cetakan dan Penggandaan*					*20,000,000*	
1.4.5	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Muara Kaman	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	13,000,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Muara Kaman	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	100,000,000	Penambahan Anggaran, mengikuti tingginya aktifitas kunjungan tamu
	Laporan Penyediaan Makan dan Minum Tamu					*13,000,000*	*Laporan Penyediaan Makan dan Minum Tamu*					*100,000,000*	
1.4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan	Kec. Muara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	35	Laporan	58,044,798	Sub Kegiatan Penyelenggaraan	Kec. Muara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	100	Laporan	350,000,00	Penambahan anggaran,

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaman	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaman	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0	menyesuaikan dengan meningkatnya kegiatan koordinasi antar perangkat daerah.
	Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi					*58,044,798*	*Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi*					*350,000,000*	
1.4.7	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Muara Kaman	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	50,000,000	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Muara Kaman	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	50,000,000	Sesuai Perencanaan awal, Diperlukan untuk Fasilitasi penatusahaan arsip.
	Dokumen Penatausahaan Arsip					*50,000,000*	*Dokumen Penatausahaan Arsip*					*50,000,000*	
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Muara Kaman	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	11	Unit	25,000,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Muara Kaman	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	11	Unit	500,000,000	
1.5.1	-	-	-	-	-	-	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kec. Muara Kaman	Jumlah Paket Mebel Disediakan	2	Paket	500,000,000	Kondisi Meja dan kursi Kerja kantor Kurang Layak.
						-	*Paket Meja Kerja*					350,000,000	
						-	*Paket Kursi Kkerja*					150,000,000	
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Muara Kaman	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	2	Unit	25,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Muara Kaman	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	0	Unit	-	Penghapusan Anggaran, Peralatan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
			yang Disediakan						yang Disediakan				dan mesin lainnya cukup.
	Peralatan Genset					*25,000,000*	*Peralatan Genset*					-	
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Muara Kaman	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	971,834,344.00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Muara Kaman	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	945,000,000.00	
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Muara Kaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5,500,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Muara Kaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5,000,000	
	Laporan Kegiatan Surat Menyurat					*5,500,000*	*Laporan Kegiatan Surat Menyurat*					*5,000,000*	Sesuai Perencanaan awal, Diperlukan untuk Fasilitasi Surat menyurat.
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Muara Kaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	261,060,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Muara Kaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	265,000,000	
	Laporan Pembayaran Listrik, Air, Internet					*261,060,000*	*Laporan Pembayaran Listrik, Air, Internet*					*265,000,000*	
1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Muara Kaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	30,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Muara Kaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Laporan	-	Penghapusan anggaran, Penyediaan Jasa Peralatan Kantor tidak

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	Jasa Peralatan Kantor					*30,000,000*	*Jasa Peralatan Kantor*					-	urgen.
1.6.4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Muara Kaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	675,274,344	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Muara Kaman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	675,000,000	Mengacu pada anggaran N-1.
	Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Non ASN					*675,274,344*	*Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Non ASN*					*675,000,000*	
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Muara Kaman	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	17	Unit	369,163,711	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Muara Kaman	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	31	Unit	1,270,000,000	
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Muara Kaman	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	228,500,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Muara Kaman	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Unit	250,000,000	Penambahan anggaran, menyesuaikan dengan penambahan kinerja.
	Pemeliharaan Kendaraan. Dinas Roda 4 dan Roda 2.					*228,500,000*	*Pemeliharaan Kendaraan. Dinas Roda 4 dan Roda 2.*					*250,000,000*	
1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan	Kec. Muara Kaman	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	*5*	Unit	15,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Kec. Muara Kaman	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	*0*	Unit	-	Penghapusan anggaran, Tidak urgen

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	Mesin Lainnya		Dipelihara				Lainnya		Dipelihara				dianggarkan.
	Pemeliharaan Peralatan lainnya					*15,000,000*	*Pemeliharaan Peralatan lainnya*					-	
1.7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Muara Kaman	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	115,663,711	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Muara Kaman	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	1,000,000,000	Kondisi Rumah Dinas Kantor Kec. Muara Kaman Kurang Layak Huni
	Rehab Rumah Dinas Kec. Muara Kaman					*115,663,711*	*Rehab Rumah Dinas Kec. Muara Kaman*					*1,000,000,000*	
1.7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Muara Kaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	Unit	10,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Muara Kaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	15	Unit	20,000,000	Sangat diperlukan mengingat kondisi beberapa sarana gedung kantor yang sudah tidak layak.
	Pemeliharaan Perabot Kantor					*10,000,000*	*Pemeliharaan Perabot Kantor*					*20,000,000*	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Muara Kaman	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	80	Persen	5,405,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Muara Kaman	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	60	Persen	34,395,000,000	
			Tingkat aksebilitas wilayah kecamatan	80	Persen				Tingkat aksebilitas wilayah kecamatan	60	Persen		
2.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan	Kec. Muara Kaman	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM)	2	SPM	50,000,000	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan	Kec. Muara Kaman	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM)	2	SPM	540,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		yang difasilitasi				Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		yang difasilitasi				
	-		-			-	Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan.	Kec. Muara Kaman	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan.	1	Dokumen	100,000,000	Diperlukan dalam upaya mendukung pelaksanaan Inovasi PAK DIANSA..
						-	*Pembuatan Aplikasi Pelayanan on_Line Kecamatan.*					*100,000,000*	
2.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Desa Muara Kaman Ulu	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	50,000,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Desa Muara Kaman Ulu	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	100,000,000	
	Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik Standar Pelayanan					*50,000,000*	*Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik Standar Pelayanan*					*50,000,000*	Untuk meningkatkan kapasitas petugas dalam rangka optimalisasi pelayanan.
						-	*Bimbingan Teknis Petugas Layanan*					*50,000,000*	Mengedukasi masyarakat

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
							Kecamatan.						terkait jenis dan standar pelayanan
	-	-	-	-	-	-	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Muara Kaman	Jumlah Laporan Peningakatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	340,000,000	
						-	*Laporan Fasilitasi "PATEN"*					50,000,000	Usulan Paket Baru, dalam rangka peningkatan dan pencapaian standar pelayanan Kecamatan.
						-	*Pelayanan Jemput Bola "Gerebek Desa"*					100,000,000	Usulan Paket Baru, mendukung pelaksanaan Inovasi PAK DIANSA.
						-	*Fasilitasi LINMAS*					190,000,000	Alokasi anggaran untuk pembayaran jasa tenaga LINMAS Kec. Muara Kaman.

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
2.2	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Muara Kaman	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1	Koordinasi	105,000,000	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Muara Kaman	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	0	Koordinasi	-	
2.2.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Kec. Muara Kaman	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	1	Unit	105,000,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Kec. Muara Kaman	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	0	Unit	-	Penghapusan anggaran, Sulitnya mengajak swasta terlibat dalam pemeliharaan sarana publik.
	Pemeliharaan Fasilitas Layanan Kecamatan					*105,000,000.00*	*Pemeliharaan Fasilitas Layanan Kecamatan*					-	
2.3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Muara Kaman	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	27	Kegiatan	5,250,000,000	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Muara Kaman	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	159	Kegiatan	33,855,000,000	
2.3.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Muara Kaman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1	Laporan	50,000,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Muara Kaman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	11	Laporan	1,555,000,000	
	Fasilitasi Kegiatan Pusat Data Kecamatan.					*50,000,000*	*Fasilitasi Kegiatan Pusat Data Kecamatan.*					*50,000,000*	Paket penugasan dari Bappeda.
							Pemeliharaan LPJU						Paket

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
												300,000,000	usulan pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan dari Dishub.
							Pengelolaan Sampah Kec. Muuara Kaman					*500,000,000*	Paket usulan dalam rangka pengelolaan sampah di Kecamatan Muara Kaman, Pelimpahan kewenangan dari DLHK
							Pemeliharaan Situs dan Museum.					*200,000,000*	Paket usulan dalam upaya pemeliharaan SITUS dan Museum yang asetnya telah dilimpahkan ke Kecamatan oleh Dinas Pendidikan.
							Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan Monumen.					*50,000,000*	Paket usulan sebagai bagian dari pelaksanaan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
													pelimpahan kewenangan
							Identifikasi Potensi dan Penyelesaian Sengketa Lahan					*50,000,000*	aket usulan dalam memfasilitasi identifikasi dan penyelesaian sengketa lahan, Bagian dari pelaksanaan pelimpahan kewenangan.
							Updating Data SKPT Kec. Muara Kaman.					*30,000,000*	Paket usulan dalam memfasilitasi penertiban administrasi lahan, bagian dari pelaksanaan pelimpahan kewenangan
							Penanganan Darurat Bencana / Bantuan Logistik Masyarakat Terdampak					*150,000,000*	Paket usulan untuk memfasilitasi masyarakat terdampak bencana alam, bagian dari pelaksanaan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
													pelimpahan kewenangan.
							Pendataan Tenaga Kerja Perusahaan Yang Berada Di Wilayah Kecamatan					*25,000,000*	Paket usulan dalam rangka penyediaan data tenaga kerja pada perusahaan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Muara Kaman (Data tenaga kerja belum tersedia)
							Pelaksanaan Even UMKM					*50,000,000*	Paket usulan sebagai upaya pengenalan dan pengembangan produk UMKM Kecamatan Muara Kaman, bagian dari pelaksanaan pelimpahan kewenangan.

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
							Pelatihan Aparatur Desa					*150,000,000*	Paket usulan dalam upaya peningkatan tata kelola Pemerintahan Desa dan Peningkatan Pelayanan di Desa, bagian dari pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari DPMD.
2.3.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	20 Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	26	Laporan	5,200,000,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	20 Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	148	Laporan	32,300,000,000	Mendukung "Program Pemantapan Konektivitas Antar Wilayah
	Pembangunan Jalan					*1,500,000,000*	*Pembangunan Turap RT.02 Desa Muara Kaman Ulu*	*Muara Kaman Ulu*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1252655
	Pembuatan Drainase					*500,000,000*	*Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Desa Muara Kaman Ulu*	*Muara Kaman Ulu*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1252979
	Peningkatan Badan Jalan					*1,500,000,000*	*Pembangunan Turap Dusun Danau Lipan, RT.02 Desa Muara Kaman Ulu*	*Muara Kaman Ulu*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1253104
	Pengurukan Jalan.						*Pembangunan /*	*Bunga*					Usulan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
						500,000,000	*Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman RT.007 Dusun Sugih Kurnia, Desa Bunga Jadi*	*Jadi*				*200,000,000*	Musrenbang, Kode 1302093
	Pembuatan Badan Jalan					*500,000,000*	*Penurapan Jalan (Beton/Pasangan Batu) RT.003 Dsn. Sugih Kurnia, Desa Bunga Jadi*	*Bunga Jadi*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1302183
	Penurapan Jalan					*500,000,000*	*Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Tunjungan*	*Tunjungan*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1339344
	Pembersihan Badan Jalan.					*200,000,000*	*Rehabilitasi Gedung Kantor Pelayanan Publik Desa Bunga Jadi*	*Bunga Jadi*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1343777
							Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) RT.08 Dusun Delta Mahakam, Desa Muara Kaman Ulu	*Muara Kaman Ulu*				*500,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1345742
							Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Lingkungan RT.16 Dusun Delta Mahakam, Desa Muara Kaman Ulu	*Muara Kaman Ulu*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1353094
							Peningkatan / Pemeliharaan Jembatan Lingkungan RT.17	*Muara Kaman Ulu*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1353113

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
							Dusun Delta Mahakam Desa Muara Kaman Ulu						
							Peningkatan/Pemeliharaan jembatan lingkungan RT.18 Dusun Delta Mahakam, Desa Muara Kaman Ulu	*Muara Kaman Ulu*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1353132
							Peningkatan / pemeliharaan jembatan lingkungan RT.19 Dusun Delta Mahakam, Desa Muara Kaman Ulu	*Muara Kaman Ulu*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1353147
							Peningakatan/pemeliharaan jembatan lingkungan RT.05 Dusun Danau Lipan, Desa Muara Kaman Ulu	*Muara Kaman Ulu*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1353328
							Pembangunan Turap Desa Dusun Danau Lipan, Desa Muara Kaman Ulu	*Muara Kaman Ulu*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1353394
							Peningkatan/Pemeliharaan jalan lingkungan RT.02 Dussun Danau Lipan, Desa Muara Kaman Ulu	*Muara Kaman Ulu*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1353437
							Pembangunan/peningkatan jalan jembatan ulin Dusun	*Muara Kaman Ulu*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
							Delta Mahakam, Desa Muara Kaman Ulu						1364897
							Peningkatan / pemeliharaan jalan lingkungan RT.09 dan RT.10 Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*250,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1374414
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan RT.09 Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1374463
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan RT.08 dan RT.09 Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*250,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1374499
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan dusun Sumber Agung, Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1374528
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan Dusun Sumber Mulyo, Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1374552
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan RT.11 Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1374690
							Normalisasi saluran drainase lingkungan	*Muara Kaman*				*250,000,00*	Usulan Musrenbang

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
							RT.04, RT.08, RT.09, Desa Muara Kaman Ilir	*Ilir*				*0*	, Kode 1374780
							Normalisasi saluran drainase lingkungan RT.10 Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang , Kode 1374854
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan RT.10 Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang , Kode 1374896
							Pembangunan jalan lingkungan RT.006 Desa Puan Cepak	*Puan Cepak*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang , Kode 1375953
							Normalisasi saluran drainase lingkungan jalan poros desa RT.006 Desa Puan Cepak	*Puan Cepak*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang , Kode 1376053
							Pembangunan pendistribusian jaringan pipa air bersih Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*250,000,000*	Usulan Musrenbang , Kode 1383563
							Pembangunan gedung kantor pelayanan publik Desa Benua Puhun	*Benua Puhun*				*500,000,000*	Usulan Musrenbang , Kode 1386874
							Pembangunan turap jalan usaha tani RT.02 Dusun Tanjung Kriu, Desa Benua Puhun	*Benua Puhun*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang , Kode 1386932

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan Desa Teratak	*Teratak*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1387817
							Pembangunan pendistribusian jaringan pipa air bersih Desa Puan Cepak	*Puan Cepak*				*250,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1396250
							Normalisasi saluran drainase lingkungan Desa Puan Cepak	*Puan Cepak*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1396112
							Pembangunan turap desa Dusun sidomulyo dan dusun buana mekar Desa Sidomukti	*Sidomukti*				*250,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1405128
							Pembangunan jalan lingkungan desa RT.003 Desa Lebaho ulaq	*Lebaho Ulaq*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1405246
							Pembangunan jalan lingkungan desa RT.02 Desa Bukit Jering	*Bukit Jering*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1405259
							Pembangunan turap desa RT.02 Desa Bukit Jering	*Bukit Jering*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1405449
							Pembangunan jalan lingkungan desa RT.01 Desa Bukit Jering	*Bukit Jering*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1405497
							Pembangunan	*Teratak*					Usulan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
							Taman Pendidikan Alquran (TPA) Desa Teratak					*500,000,000*	Musrenbang, Kode 1407140
							Pembangunan jalan lingkungan desa RT.02 esa Liang Buaya	*Liang Buaya*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1409127
							Pembangunan jalan lingkungan desa RT.07 Desa Liang Buaya	*Liang Buaya*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1408951
							Normalisasi saluran drainase lingkungan RT.003 Dsn. Sugih Kurnia, RT.017, 025, 027 Dsn Bukit Betali dan RT.020, 021, 022 Dsn Koram Baru Desa Bunga Jadi	*Bunga Jadi*				*750,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1413681
							Pembangunan jalan lingkungan desa RT.13 Dsn Sugih Kurnia Desa Bunga Jadi	*Bunga Jadi*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1413752
							Pembangunan jalan lingkungan cdesa RT.017 Dsn Sugih Kurnia Desa Bunga Jadi	*Bunga Jadi*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1413770
							Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) RT.013, Dsn. Sugih Kurnia Desa Bunga	*Bunga Jadi*				*500,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1413838

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
							Jadi						
							Pembangunan turap desa Dusun Danau Lipan Desa Muara Kaman Ulu	*Muara Kaman Ulu*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1415743
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan Dusun Mekar Sari dan Dusun Mekar Baru Desa Kupang Baru	*Kupang Baru*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1422437
							Pembangunan dan perbaikan MCK umum/komunal SDN 024 Dusun Mekar Sari Desa Kupang Baru	*Kupang Baru*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1422438
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan Desa Menamang Kanan	*Menamang Kanan*				*250,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1422900
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan Desa Teratak	*Teratak*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1423351
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan Jl. Reformasi II Desa Benua Puhun	*Benua Puhun*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1427894
							Pembangunan saluran gorong-gorong desa Jln. Reformasi II Desa Benua Puhun	*Benua Puhun*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1427903

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
							Pembuatan tempat sampah penampungan sementara Desa Benua Puhun	*Benua Puhun*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1427921
							Normalisasi saluran drainase lingkungan Dusun Cipari, Desa Cipari Makmur	*Cipari Makmur*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1428306
							Pembangunan turap desa, lingkungan Desa Cipari Makmur	*Cipari Makmur*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1428512
							Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat organisasi Desa Menamang Kiri	*Menamang Kiri*				*250,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1431788
							Pembangunan jalan lingkungan Desa Menamang Kiri	*Menamang Kiri*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1431803
							Pembangunan jalan lingkungan 2 Desa Menamang Kiri	*Menamang Kiri*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1431823
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan RT.003 Desa Liang Buaya	*Liang Buaya*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1436312
							Pembangunan/rehabilitasi sekretariat organisasi RT.07 Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*250,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1436479
							Pembangunan	*Panca*					Usulan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
							pendistribusian jaringan pipa air bersih Pertanian Desa Panca Jaya	*Jaya*				*200,000,000*	Musrenbang, Kode 1589220
							Pemabangunan jalan lingkungan Desa Puan Cepak	*Puan Cepak*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1396200
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan Desa Sedulang	*Sedulang*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1395876
							Peningkatan / pemeliharaan jembatan lingkungan Desa Sedulang	*Sedulang*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1395789
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan 2 Desa Sedulang	*Sedulang*				*200,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1395779
							Pembangunan jalan lingkungan desa RT.04 dan RT.05 Desa Muara Siran	*Muara Siran*				*250,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1395525
							Pembuatan tempat sampah penampungan sementara jalan poros desa RT.006 Desa Puan Cepak	*Puan Cepak*				*250,000,000*	Usulan Musrenbang, Kode 1378182
							Pembangunan jalan lingkungan desa Jalan jembatan ulin gang family RT.01	*Lebaho Ulaq*				*200,000,000*	Usulan POKIR, kode 741724

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
							Desa Laboho Ulaq						
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan jalan perjuangan RT.19 Desa Sidomukti	*Sidomukti*				*200,000,000*	Usulan POKIR, kode 741736
							Pembangunan jalan lingkungan desa (Pembuatan jembatan tanjung asam) Desa Teratak	*Teratak*				*250,000,000*	Usulan POKIR, kode 741749
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Semenisasi jalan desa) Desa Menamang Kanan	*Menamang Kanan*				*200,000,000*	Usulan POKIR, kode 741757
							Pembuatan saluran gorong-gorong desa (Pembuatan parit) RT.03 Desa Teratak	*Teratak*				*200,000,000*	Usulan POKIR, kode 742371
							Pembangunan saluran gorong-gorong (Pembuatan Parit) RT.04 Desa Teratak	*Teratak*				*200,000,000*	Usulan POKIR, kode 742378
							Pembangunan saluran gorong-gorong desa (Normalisasi parit tanjung asam) Desa Teratak	*Teratak*				*200,000,000*	Usulan POKIR, kode 742382
							Pembangunan pendistribusian jaringan pipa air	*Menamang Kiri*				*200,000,000*	Usulan POKIR, kode 760605

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
							bersih (Pengadaan Tandon Air) Desa Menamang Kiri						
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan Dusun Danau Baru Desa Menamang Kiri	*Menamang Kiri*				*200,000,000*	Usulan POKIR, kode 760629
							Pembangunan jalan lingkungan desa (Pengerasan jalan Muso Bin Salim) RT.2 Desa Muara Kaman Ulu	*Muara Kaman Ulu*				*200,000,000*	Usulan POKIR, kode 761411
							Pembangunan pendistribusian jaringan pipa air bersih (Pengadaan Tandon Air) Desa Lebaho Ulaq	*Lebaho Ulaq*				*200,000,000*	Usulan POKIR, kode 826951
							Pembangunan pendistribusian jaringan pipa air bersih (Pengadaan Tandon Air) Desa Sabintulung	*Sabintulung*				*200,000,000*	Usulan POKIR, kode 826971
							Pembangunan pendistribusian jaringan pipa air bersih (Lanjutan pengadaan Air Minum) Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,000*	Usulan POKIR, kode 826983
							Pembangunan pendistribusian	*Sabintulung*				*200,000,00*	Usulan POKIR, kode

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
							jaringan pipa air bersih (Pengadaan Tandon Air 500 Liter) Desa Sabintulung					*0*	826990
							Peningkatan / pemeliharaan jalan lingkungan (Lanjutan pengurukan alun-alun) Desa Teratak	*Teratak*				*200,000,000*	Usulan POKIR, kode 827016
							Rehabilitasi gedung kantor pelayan publik (Rehab Gedung BPU) Desa Muara Kaman Ulu	*Muara Kaman Ulu*				*200,000,000*	Usulan POKIR, kode 827024
							Peningkatan/pemeliharaan jembatan lingkungan (Pembangunan jembatan ulin) RT.009 Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,000*	Usulan POKIR, kode 827217
							Pembangunan turap desa RT.015 Dusun Mulyo Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,000*	Usulan POKIR, kode 827234
							Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Semenisasi Jalan Musuk Dusun) Dusun Sumber Mulyo Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,000*	Usulan POKIR, kode 827239

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
							Peningkatan/pemeli haraan jalan lingkungan (Semenisasi jalan) RT.013 Dusun Sumber Agung, Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,00 0*	Usulan POKIR, kode 827260
							Normalisasi saluran drainase lingkungan (Rehabilitasi semenisasi) RT.03 Desa Muara Kaman ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,00 0*	Usulan POKIR, kode 827276
							Peningkatan/pemeli haraan jalan lingkungan (Rehablitasi semenisasi jalan) RT.01 Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,00 0*	Usulan POKIR, Kode 827281
							Peningkatan/pemeli haraan jembatan lingkungan (Pembuatan jembatan beton) RT.10 Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,00 0*	Usulan POKIR, Kode 827294
							Pembangunan Turap Desa jalan tambak malang Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,00 0*	Usulan POKIR, Kode 827463
							Peningkatan/pemeli haraan jalan lingkungan (semenisasi jalan)	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,00 0*	Usulan POKIR, Kode 827303

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
							RT.016 Dusun Sumber Mulyo Desa Muara Kaman Ilir						
							Peningkatan/pemeli haraan jalan lingkungan (Peningkatan jalan) RT.015 Dusun Sumber Mulyo Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,00 0*	Usulan POKIR, Kode 827313
							Peningkatan/pemeli haraan jalan lingkungan (peningkatan badan jalan) RT.010 Dusun Sumber Mulyo Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,00 0*	Usulan POKIR, Kode 827320
							Pembangunan Turap (Turap Batu jalan tambatan perahu) RT.11 Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,00 0*	Usulan POKIR, Kode 827330
							Peningkatan/pemeli haraan jalan lingkungan (Lanjutan semenisasi jalan tambatan perahu) RT.11 Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,00 0*	Usulan POKIR, Kode 827360
							Peningkatan/pemeli haraan jembatan lingkungan (Rehabilitasi semenisasi	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,00 0*	Usulan POKIR, Kode 827406

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
							jembatan) RT.010 Desa Muara Kaman Ilir						
							Peningkatan/pemeli haraan jalan lingkungan (Semenisasi jalan) RT.13 Dusun Sumber Mulyo Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,00 0*	Usulan POKIR, Kode 827422
							Peningkatan/pemeli haraan jalan lingkungan (Semenisasi jalan) Jalan Awang Long Dusun Sumber Agung Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,00 0*	Usulan POKIR, Kode 827430
							Peningkatan/pemeli haraan jalan lingkungan (Semenisasi jalan) RT.17Dusun Sumber Agung Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,00 0*	Usulan POKIR, Kode 827433
							Peningkatan/pemeli haraan jalan lingkungan (semenisasi jalan) RT.19 Dusun sumber Agung Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,00 0*	Usulan POKIR, Kode 827475
							Pembangunan Turap Desa (Penurapan batu) RT.15 Dusun	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,00 0*	Usulan POKIR, Kode 827535

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
							Sumber Mulyo Desa Muara Kaman Ilir						
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Semenisasi jalan) Dusun Sumber Mulyo Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 827544
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (lanjutan semenisasi jalan) Dusun Sumber Agung Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 827558
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (semenisasi jalan) RT.18 Dusun Sumber Agung Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 827568
							Normalisasi saluran drainase (Pembuatan drainase) RT.18 Dusun Sumber Agung Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 827577
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Rehabilitasi semenisasi jalan)	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 827587

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
							RT.03 Desa Muara Kaman Ilir						
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Rehabilitasi semenisasi jalan) RT.001 Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 827599
							Peningkatan/pemeliharaan jembatan lingkungan (Pembangunan jembatan beton) RT.010 Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*250,000,000*	Usulan POKIR, Kode 827606
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Semenisasi jalan) RT.016 Dusun Sumber Mulyo Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 827634
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Peningkatan jalan) RT.015 Dusun Sumber Mulyo Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 827646
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Peningkatan badan jalan) RT.010 Desa	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 827665

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
							Muara Kaman Ilir						
							Pembangunan Turap Desa (Penurapan Batu) Jalan tambatan perahu RT.11 Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 827691
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (lanjutan semenisasi) Jalan tambatan perahu RT.11 Desa Muara Kaman Ilir4	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 827712
							Peningkatan/pemeliharaan jembatan lingkungan (Rehabilitasi semenisasi jembatan) RT.10 Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 827729
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Semenisasi jalan) RT.013 Dusun Sumber Mulyo Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 827739
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (semenisasi jallan) Jalan Awang Long Dusun Sumber	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 827755

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
							Agung Desa Muara Kaman Ilir						
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Semenisasi jalan)RT.17 Dusun Sumber Agung Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 827772
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Semenisasi jalan Bukit Jering menuju jalan poros Kota Bangun) RT.2 Desa Bukit Jering	*Bukit Jering*				*250,000,000*	Usulan POKIR, Kode 827895
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Peningkatan jalan bukit jering menuju jalan muara siran) RT.1 Desa Bukit Jering	*Bukit Jering*				*250,000,000*	Usulan POKIR, Kode 827900
							Pembangunan Turap Desa (Pembangunan turap jalan) Jalan seberang kampung RT.02 Desa Muara Kaman Ulu	*Muara Kaman Ulu*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 827907
							Rehabilitasi Gedung Kantor Pelayanan Publik (Rehab Gedung BPU) Desa	*Muara Kaman Ulu*				*250,000,000*	Usulan POKIR, Kode 827921

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
							Muara Kaman Ulu						
							Normalisasi saluran drainase RT.24 Dusun Buana Mekar Desa Sidomukti	*Sidomukti*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 829482
							Peningkatan/pemeliharaan jembatan lingkungan (Pembangunan jembatan ulin) RT.01 Desa Tunjungan	*Tunjungan*				*250,000,000*	Usulan POKIR, Kode 867314
							Peningkatan/pemeliharaan jembatan lingkungan (lanjutan pembangunan jembatan ulin tambak dua dusun mkp) Dusun Kedang Pala Desa Bukit Jering	*Bukit Jering*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 867740
							Pembangunan/rehabilitasi sekretariat organisasi (Pengurukan halan masjid Nurul Iman) Desa Muara Kaman Ulu	*Muara Kaman Ulu*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 868320
							Pembangunan jalan lingkungan (lanjutan turap batu) RT.015 Desa Muara Kaman Ulu	*Muara Kaman Ulu*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 868311
							Peningkatan/pemeliharaan jembatan lingkungan	*Muara Kaman Ulu*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 868330

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
							(Semenisasi jembatan ulin) RT.016 Desa Muara Kaman Ulu						
							Peningkatan/pemeli haraan jembatan lingkungan (Semenisasi jembatan ulin) RT.003 Desa Kupang Baru	*Kupang Baru*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 868337
							Pembangunan jalan lingkungan (LLanjutan semenisasi) RT.002 Desa Muara Kaman Ulu	*Muara Kaman Ulu*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 868351
							Pembangunan jalan lingkungan (lanjutan turap batu) RT.010 Desa Muara Kaman Ilir	*Muara Kaman Ilir*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 868362
							Peningkatan/pemeli haraan jalan lingkungan (lanjutan semenisasi RT.08 Desa Teratak	*Teratak*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 872357
							Peningkatan/pemeli haraan jembatan lingkungan (pembangunan jembatan ulin PAUD PERMATA BUNDA Desa Muara Kaman Ulu	*Muara Kaman Ulu*				*250,000,000*	Usulan POKIR, Kode 872435

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
							Pembangunan turap desa (turap batu) Desa Muara Kaman Ulu	*Muara Kaman Ulu*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 872508
							Peningkatan/pemeliharaan jembatan lingkungan (lanjutan pembangunan jembatan ulin) RT.01 Desa Tunjungan	*Tunjungan*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 872556
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (lanjutan semenisasi) RT8 Desa Teratak	*Teratak*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 872582
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (pengerasan jalan) Desa Menamang Kiri	*Menamang Kiri*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 872763
							Pembangunan jalan lingkungan desa (semenisasi jalan) RT.05 Desa Menamang Kanan	*Menamang Kanan*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 872869
							Pembangunan jalan lingkungan (Lanjutan semenisasi gang bola blok L) Desa Sidomukti	*Sidomukti*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 873058
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Pengerasan badan	*Panca Jaya*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 873128

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
							jalan) Dusun Suka Jaya Desa Panca Jaya						
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Pengerasan jalan usaha tani) RT.018 Desa Bunga Jadi	*Bunga Jadi*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 874598
							Pembangunan jalan lingkungan (semenisasi jalan lingkungan) Desa Lebaho Ulaq	*Lebaho Ulaq*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 874760
							Pembangunan pendistribusian jaringan pipa air bersih (Pembuatan penampungan air bersih dan sumur bor) Desa Lebaho Ulaq	*Lebaho Ulaq*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 876275
							Pembangunan taman pendidikan Alquran (TPA) AL-TAQWA RT.010 Dusun Aji Bidara Putih Desa Muara Kaman Ulu	*Muara Kaman Ulu*				*250,000,000*	Usulan POKIR, Kode 885494
							Pembangunan jalan lingkungan (Pembangunan jembatan gang) Dusun Delta Mahakam RT.018	*Muara Kaman Ulu*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 884486

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
							Dusun Aji Bidara Putih Desa Muara Kaman Ulu						
							Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Semenisasi jalan kuburan baru) RT.015 Dusun Aji Bidara Putih Desa Muara Kaman Ulu	*Muara Kaman Ulu*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 884501
							Pembangunan jalan lingkungan (semenisasi jalan) Desa Sabintulung	*Sabintulung*				*200,000,000*	Usulan POKIR, Kode 885867
							Pengadaan Tandon Air Bersih Desa Menamang Kanan	*Menamang Kanan*				*200,000,000*	Belum tersedianya Jaringan / penyaluran air bersih Desa Menamang Kanan
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Muara Kaman	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif	80	Persen	365,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Muara Kaman	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif	80	Persen	2,150,000,000	
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Muara Kaman	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	20	Koordinasi	365,000,000	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Muara Kaman	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	20	Koordinasi	1,950,000,000	
3.1	Sub Kegiatan	Desa	Jumlah Lembaga	4	Lembaga		Sub Kegiatan	Desa	Jumlah Lembaga	10	Lembaga		Alokasi

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Muara Kaman Ilir	Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			50,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Muara Kaman Ilir	Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			100,000,000	anggaran kegiatan pra musrenbang dan musrenbang kecamatan tidak mencukupi.
	Pelaksanaan Forum Musyawarah Pembangunan Desa					*50,000,000*	*Pelaksanaan Forum Musyawarah Pembangunan Desa*					*100,000,000*	
3.1 .2	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Desa Muara Kaman Ulu, Desa Muara Kaman Ilir.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	315,000,000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Desa Muara Kaman Ulu, Desa Muara Kaman Ilir.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9	Laporan	1,850,000,000	Kegiatan Rutin yang dilaksanakan di Kecamatan belum teranggarkan
	Fasilitasi Kegiatan MTQ					*315,000,000*	*Fasilitasi Kegiatan MTQ*					*450,000,000*	Penambahan alokasi anggaran paket karena adanya penambahan kinerja (MTQ tingkat Desa Kec. Muara Kaman dan MTQ Tingkat Kecamatan)
							Fasilitasi Kegiatan PKK dan HKG PKK					*200,000,00*	Paket usulan,

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
												0	dalam rangka mengikuti kegiatan HKG PKK.
							Fasilitasi Kegiatan HUT-RI					*200,000,000*	Paket usulan mengingat Kegiatan Peringatan HUT RI merupakan agenda Rutin yang wajib untuk dilaksanakan
							Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Pahlawan.					*200,000,000*	Paket usulan, mengingat Peringatan Hari Pahlawan merupakan agenda Rutin di Kecamatan Muara Kaman karena adanya makam pahlawan di Desa Muara Kaman Ulu.

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
							Fasilitasi Kegiatan Posyandu					*200,000,000*	Usulan Paket sebagai upaya optimalisasi aktifitas POSYANDU. (Mendukung penanganan Stunting).
							Fasilitasi Kegiatan Pramuka					*50,000,000*	Usulan Paket untuk pelaksanaan kegiatan pramuka yang menjadi agenda rutin di Kecamatan Muara Kaman.
							Fasilitasi POKJANAL Posyandu					*100,000,000*	Usulan paket dalam rangka fasilitasi operasional Kelompok Kerja Posyandu, (Mendukung penanganan stunting).
							Fasilitasi ERAU Kec. Muara Kaman					*300,000,00*	Usulan Paket untuk

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
												0	fasilitasi kegiatan Erau yang menjadi agenda Rutin di Desa Sabintulung dan di Tenggarong.
							Pelatihan / BIMBINGAN TEKNIS Kader POSYANDU					*150,000,000*	Usulan Paket sebagai upaya peningkatan SDM Kader POSYANDU. (Mendukung penanganan stunting).
3.2	-		-			-	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Muara Kaman	Jumlah Kegiatan emberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4	Kegiatan	200,000,000.00	
	-		-	-		-	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec. Muara Kaman	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	500	Keluarga	50,000,000	Mendukung pelaksanaan program penanggulangan Kemiskinan di Kec. Muara Kaman
							Fasilitasi Distribusi Pangan Keluarga Pra Sejahtera.					*50,000,000*	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
3.2.1	-		-	-		-	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kec. Muara Kaman	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	500	Keluarga	50,000,000	Mendukung pelaksanaan program penanggulangan Kemiskinan di Kec. Muara Kaman
							Updating Data RTLH Kec. Muara Kaman					*50,000,000*	
3.2.2	-		-	-		-	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapka Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec. Muara Kaman	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1,000	Kelaurag a	50,000,000	Mendukung pelaksanaan program penanggulangan Kemiskinan di Kec. Muara Kaman
							Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					*50,000,000*	
3.2.3	-		-	-		-	Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga	Kec. Muara Kaman	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan	1,500	Keluarga	50,000,000	Mendukung pelaksanaan program penanggulan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
							dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				gan Kemiskinan di Kec. Muara Kaman
							Update Data DTKS.					*50,000,000*	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Muara Kaman	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi	80	Persen	50,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Muara Kaman	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi	80	Persen	75,000,000	
4.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Muara Kaman	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	Kegiatan	50,000,000	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Muara Kaman	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4	Kegiatan	75,000,000	
4.1 .1	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Desa Muara Kaman Ulu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	1	Laporan	25,000,000	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Desa Muara Kaman Ulu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	2	Laporan	25,000,000	Mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban di masyarakat

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	Kecamatan		di Wilayah Kecamatan						di Wilayah Kecamatan				
	Laporan Kegiatan Sinergitas dengan Instansi Vertikal di Kecamatan.					*25,000,000*	*Laporan Kegiatan Sinergitas dengan Instansi Vertikal di Kecamatan.*					*25,000,000*	
4.1.2	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Desa Muara Kaman Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	25,000,000	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Desa Muara Kaman Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	Laporan	50,000,000	(Pelimpahan dari Kesbangpol) Penambahan Kinerja pelaksanaan Forum Pembaruan Kebangsaan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
	Laporan Kegiatan Harmonisasi (Fasilitasi FKUB).					*25,000,000*	*Laporan Kegiatan Harmonisasi (Fasilitasi FKUB,Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)*					*50,000,000*	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Muara Kaman	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	80	Persen	210,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Muara Kaman	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	80	Persen	75,000,000	
5.1	Kegitan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Muara Kaman	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	2	Urusan	210,000,000	Kegitan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Muara Kaman	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	2	Urusan	75,000,000	
5.1	Sub Kegiatan	Desa	Jumlah Orang	80	Orang		Sub Kegiatan	Desa	Jumlah Orang	200	Orang		Alokasi

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
.1	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Muara Kaman Ulu	yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0		200,000,000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Muara Kaman Ulu	yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			50,000,000	anggaran cukup 50.000.000,- mengingat tingkat kerukunan masyarakat Kec. Muara Kaman Kondusif.
	Kegiatan Pembinaan / Sosialisasi					*200,000,000*	*Kegiatan Pembinaan / Sosialisasi*					*50,000,000*	
5.1 .2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Desa Muara Kaman Ulu	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dokumen	10,000,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Desa Muara Kaman Ulu	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dokumen	25,000,000	
	Dokumen Pelaksanaan Forum Koordinasi					*10,000,000*	*Dokumen Pelaksanaan Forum Koordinasi*					*25,000,000*	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Muara Kaman	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	45	Persen	150,000,000.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Muara Kaman	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	45	Persen	380,000,000.00	
6.1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Kec. Muara Kaman	Jumlah Desa Yang difasilitasi	20	Desa	150,000,000.00	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Kec. Muara Kaman	Jumlah Desa Yang difasilitasi	20	Desa	380,000,000.00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
6.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Desa (Sidomukti, Cipari Makmur, Panca Jaya, Bunga Jadi, Teratak, Benu Puhun, Rantau Hempang, Lebaho Ulaq, Muara Kaman Ilir, Muara Kaman Ulu, Muara Siran, Bukit Jering, Kupang Baru, Sabintulung, Tunjung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20	Dokumen	100,000,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Desa (Sidomukti, Cipari Makmur, Panca Jaya, Bunga Jadi, Teratak, Benu Puhun, Rantau Hempang, Lebaho Ulaq, Muara Kaman Ilir, Muara Kaman Ulu, Muara Siran, Bukit Jering, Kupang Baru, Sabintulung, Tunjung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20	Dokumen	100,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
		an, Liang Buaya, Sedulang, Puan Cepak, Menamang Kanan, Menamang Kiri						an, Liang Buaya, Sedulang, Puan Cepak, Menamang Kanan, Menamang Kiri					
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa					*50,000,000*	*Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa*					*50,000,000*	Mendukung pencapaian peningkatan status IDM
	Monitoring Pengelolaan APBDes					*50,000,000*	*Monitoring Pengelolaan APBDes*					*50,000,000*	
	-		-			-	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*5*	Dokumen	50,000,000	
						-	*Dokumen Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa*					*50,000,000*	Usulan Paket Baru, mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa di 5 Desa tahun 2025
	-		-			-	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan	Desa Muara Kaman Ulu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan	*5*	Dokumen	30,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
							Permusyawaratan Desa		Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.				
						-	*Dokumen Fasilitasi Pemilihan BPD.*					*30,000,000*	Usulan Paket Baru, mendukung pelaksanaan pemilihan BPD di 5 Desa tahun 2025
	-		-			-	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Muara Kaman				150,000,000	
						-	*Penyusunan Profil Desa Kecamatan Muara Kaman*					*150,000,000*	Usulan Paket Baru, belum tersedianya profil desa se Kecamatan Muara Kaman.
6.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	20 Desa (Sidomukti, Cipari Makmur, Panca	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	20	Laporan	50,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	20 Desa (Sidomukti, Cipari Makmur, Panca	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	20	Laporan	50,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
		Jaya, Bunga Jadi, Teratak, Benu Puhun, Rantau Hempang, Lebaho Ulaq, Muara Kaman Ilir, Muara Kaman Ulu, Muara Siran, Bukit Jering, Kupang Baru, Sabintulung, Tunjungan, Liang Buaya, Sedulang, Puan Cepak, Menamang Kanan, Menamang Kiri						Jaya, Bunga Jadi, Teratak, Benu Puhun, Rantau Hempang, Lebaho Ulaq, Muara Kaman Ilir, Muara Kaman Ulu, Muara Siran, Bukit Jering, Kupang Baru, Sabintulung, Tunjungan, Liang Buaya, Sedulang, Puan Cepak, Menamang Kanan, Menamang Kiri					

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana(Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	Laporan Kegiatan Pendampingan Desa					*50,000,000*	*Laporan Kegiatan Pendampingan Desa*					*50,000,000*	Paket sesuai perencanaan awal, upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil analisis terhadap rancangan RKPD Kecamatan Muara Kaman, terdapat Koreksi pada beberapa kegiatan sehingga mengalami perubahan dan berdampak pada penambahan maupun pengurangan anggaran, sebagai akibat dari penyesuaian terhadap beberapa kebijakan, maupun urgensi dari kegiatan itu sendiri.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Renja Kecamatan Muara Kaman Kutai Kartanegara memberi ruang untuk mengakomodir Usulan dari para pemangku kepentingan, seperti masyarakat secara langsung maupun melalui badan legislatif (angota DPRD), LSM, Akademisi, maupun lintas OPD melalui mekanisme Musrenbang, baik pada tingkat Desa selanjutnya didiskusikan dalam pembahasan Musrenbang, forum OPD Kabupaten maupun Musrenbang Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan usulan dari hasil musrenbang OPD kabupaten di tingkat Kecamatan. Usulan para pemangku kepentingan ini, masih sejalan dengan isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Muara Kaman maupun Perangkat Daerah lain yang terkait, seperti yang tercermin pada Program dan Kegiatan dalam Dokumen Renstra Kecamatan Muara Kaman Kutai Kartanegara 2021-2026.

Kesesuaian usulan pemangku kepentingan dengan program kerja dari Kecamatan Muara Kaman tidak terlepas dari adanya proses pelaksanaan kegiatan Musrenbang baik tingkat Desa, Kecamatan maupun pada Kabupaten yang berjalan sangat baik. Beberapa masukan dan usulan dari para pemangku kepentingan terhadap Kecamatan Muara Kaman Kutai Kartanegara, disampaikan dalam table TC.32 di bawah.

Tabel TC.32. Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun Rencana 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara.

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait Kewenangan lain yaang Dilimpahkan.	20 Desa	Jumlah Laporan Kegiatan	148	Laporan	
1	Pembangunan Turap RT.02 Desa Muara Kaman Ulu	Muara Kaman Ulu	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1252655
2	Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Desa Muara Kaman Ulu	Muara Kaman Ulu	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1252979
3	Pembangunan Turap Dusun Danau Lipan, RT.02 Desa Muara Kaman Ulu	Muara Kaman Ulu	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1253104
4	Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman RT.007 Dusun Sugih Kurnia, Desa Bunga Jadi	Bunga Jadi	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1302093
5	Penurapan Jalan (Beton/Pasangan Batu) RT.003 Dsn. Sugih Kurnia, Desa Bunga Jadi	Bunga Jadi	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1302183
6	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Tunjungan	Tunjungan	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1339344
7	Rehabilitasi Gedung Kantor Pelayanan Publik Desa Bunga Jadi	Bunga Jadi	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1343777
8	Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) RT.08 Dusun Delta Mahakam, Desa Muara Kaman Ulu	Muara Kaman Ulu	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1345742
9	Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Lingkungan RT.16 Dusun Delta Mahakam, Desa Muara Kaman Ulu	Muara Kaman Ulu	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1353094
10	Peningkatan / Pemeliharaan Jembatan Lingkungan RT.17 Dusun Delta Mahakam Desa Muara Kaman Ulu	Muara Kaman Ulu	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1353113
11	Peningkatan/Pemeliharaan jembatan lingkungan RT.18 Dusun Delta Mahakam, Desa Muara Kaman Ulu	Muara Kaman Ulu	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1353132
12	Peningkatan / pemeliharaan jembatan lingkungan RT.19 Dusun Delta Mahakam, Desa Muara Kaman Ulu	Muara Kaman Ulu	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1353147
13	Peningakatan/pemeliharaan jembatan lingkungan RT.05 Dusun Danau Lipan, Desa Muara Kaman Ulu	Muara Kaman Ulu	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1353328
14	Pembangunan Turap Desa Dusun Danau Lipan, Desa Muara Kaman Ulu	Muara Kaman Ulu	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1353394
15	Peningkatan/Pemeliharaan jalan lingkungan RT.02 Dussun Danau Lipan, Desa Muara Kaman Ulu	Muara Kaman Ulu	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1353437
16	Pembangunan/peningkatan jalan jembatan ulin Dusun Delta Mahakam, Desa Muara Kaman Ulu	Muara Kaman Ulu	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1364897
17	Peningkatan / pemeliharaan jalan lingkungan RT.09 dan RT.10 Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1374414
18	Peningkatan/pemeliharaan jalan	Muara	Jumlah	1	Laporan	Usulan Musrenbang,

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
	lingkungan RT.09 Desa Muara Kaman Ilir	Kaman Ilir	Laporan Kegiatan			Kode 1374463
19	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan RT.08 dan RT.09 Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1374499
20	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan dusun Sumber Agung, Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1374528
21	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan Dusun Sumber Mulyo, Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1374552
22	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan RT.11 Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1374690
23	Normalisasi saluran drainase lingkungan RT.04, RT.08, RT.09, Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1374780
24	Normalisasi saluran drainase lingkungan RT.10 Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1374854
25	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan RT.10 Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1374896
26	Pembangunan jalan lingkungan RT.006 Desa Puan Cepak	Puan Cepak	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1375953
27	Normalisasi saluran drainase lingkungan jalan poros desa RT.006 Desa Puan Cepak	Puan Cepak	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1376053
28	Pembangunan pendistribusian jaringan pipa air bersih Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1383563
29	Pembangunan gedung kantor pelayanan publik Desa Benua Puhun	Benua Puhun	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1386874
30	Pembangunan turap jalan usaha tani RT.02 Dusun Tanjung Kriu, Desa Benua Puhun	Benua Puhun	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1386932
31	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan Desa Teratak	Teratak	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1387817
32	Pembangunan pendistribusian jaringan pipa air bersih Desa Puan Cepak	Puan Cepak	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1396250
33	Normalisasi saluran drainase lingkungan Desa Puan Cepak	Puan Cepak	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1396112
34	Pembangunan turap desa Dusun sidomulyo dan dusun buana mekar Desa Sidomukti	Sidomukti	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1405128
35	Pembangunan jalan lingkungan desa RT.003 Desa Lebaho ulaq	Lebaho Ulaq	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1405246
36	Pembangunan jalan lingkungan desa RT.02 Desa Bukit Jering	Bukit Jering	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1405259
37	Pembangunan turap desa RT.02 Desa Bukit Jering	Bukit Jering	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1405449
38	Pembangunan jalan lingkungan desa RT.01 Desa Bukit Jering	Bukit Jering	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1405497
39	Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) Desa Teratak	Teratak	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1407140
40	Pembangunan jalan lingkungan	Liang Buaya	Jumlah	1	Laporan	Usulan Musrenbang,

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
	desa RT.02 esa Liang Buaya		Laporan Kegiatan			Kode 1409127
41	Pembangunan jalan lingkungan desa RT.07 Desa Liang Buaya	Liang Buaya	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1408951
42	Normalisasi saluran drainase lingkungan RT.003 Dsn. Sugih Kurnia, RT.017, 025, 027 Dsn Bukit Betali dan RT.020, 021, 022 Dsn Koram Baru Desa Bunga Jadi	Bunga Jadi	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1413681
43	Pembangunan jalan lingkungan desa RT.13 Dsn Sugih Kurnia Desa Bunga Jadi	Bunga Jadi	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1413752
44	Pembangunan jalan lingkungan cdesa RT.017 Dsn Sugih Kurnia Desa Bunga Jadi	Bunga Jadi	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1413770
45	Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) RT.013, Dsn. Sugih Kurnia Desa Bunga Jadi	Bunga Jadi	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1413838
46	Pembangunan turap desa Dusun Danau Lipan Desa Muara Kaman Ulu	Muara Kaman Ulu	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1415743
47	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan Dusun Mekar Sari dan Dusun Mekar Baru Desa Kupang Baru	Kupang Baru	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1422437
48	Pembangunan dan perbaikan MCK umum/komunal SDN 024 Dusun Mekar Sari Desa Kupang Baru	Kupang Baru	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1422438
49	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan Desa Menamang Kanan	Menamang Kanan	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1422900
50	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan Desa Teratak	Teratak	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1423351
51	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan Jl. Reformasi II Desa Benua Puhun	Benua Puhun	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1427894
52	Pembangunan saluran gorong-gorong desa Jln. Reformasi II Desa Benua Puhun	Benua Puhun	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1427903
53	Pembuatan tempat sampah penampungan sementara Desa Benua Puhun	Benua Puhun	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1427921
54	Normalisasi saluran drainase lingkungan Dusun Cipari, Desa Cipari Makmur	Cipari Makmur	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1428306
55	Pembangunan turap desa, lingkungan Desa Cipari Makmur	Cipari Makmur	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1428512
56	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat organisasi Desa Menamang Kiri	Menamang Kiri	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1431788
57	Pembangunan jalan lingkungan Desa Menamang Kiri	Menamang Kiri	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1431803
58	Pembangunan jalan lingkungan 2 Desa Menamang Kiri	Menamang Kiri	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1431823
59	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan RT.003 Desa Liang Buaya	Liang Buaya	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1436312
60	Pembangunan/rehabilitasi sekretariat organisasi RT.07 Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1436479

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
61	Pembangunan pendistribusian jaringan pipa air bersih Pertanian Desa Panca Jaya	Panca Jaya	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1589220
62	Pemabangunan jalan lingkungan Desa Puan Cepak	Puan Cepak	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1396200
63	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan Desa Sedulang	Sedulang	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1395876
64	Peningkatan / pemeliharaan jembatan lingkungan Desa Sedulang	Sedulang	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1395789
65	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan 2 Desa Sedulang	Sedulang	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1395779
66	Pembangunan jalan lingkungan desa RT.04 dan RT.05 Desa Muara Siran	Muara Siran	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1395525
67	Pembuatan tempat sampah penampungan sementara jalan poros desa RT.006 Desa Puan Cepak	Puan Cepak	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan Musrenbang, Kode 1378182
68	Pembangunan jalan lingkungan desa Jalan jembatan ulin gang family RT.01 Desa Laboho Ulaq	Lebaho Ulaq	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, kode 741724
69	Peningkatan/pemelliharaan jalan lingkungan jalan perjuangan RT.19 Desa Sidomukti	Sidomukti	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, kode 741736
70	Pembangunan jalan lingkungan desa (Pembuatan jembatan tanjung asam) Desa Teratak	Teratak	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, kode 741749
71	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Semenisasi jalan desa) Desa Menamang Kanan	Menamang Kanan	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, kode 741757
72	Pembuatan saluran gorong-gorong desa (Pembuatan parit) RT.03 Desa Teratak	Teratak	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, kode 742371
73	Pembangunan saluran gorong-gorong (Pembuatan Parit) RT.04 Desa Teratak	Teratak	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, kode 742378
74	Pembangunan saluran gorong-gorong desa (Normalisasi parit tanjung asam) Desa Teratak	Teratak	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, kode 742382
75	Pembangunan pendistribusian jaringan pipa air bersih (Pengadaan Tandon Air) Desa Menamang Kiri	Menamang Kiri	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, kode 760605
76	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan Dusun Danau Baru Desa Menamang Kiri	Menamang Kiri	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, kode 760629
77	Pembangunan jalan lingkungan desa (Pengerasan jalan Muso Bin Salim) RT.2 Desa Muara Kaman Ulu	Muara Kaman Ulu	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, kode 761411
78	Pembangunan pendistribusian jaringan pipa air bersih (Pengadaan Tandon Air) Desa Lebaho Ulaq	Lebaho Ulaq	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, kode 826951
79	Pembangunan pendistribusian jaringan pipa air bersih (Pengadaan Tandon Air) Desa Sabintulung	Sabintulung	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, kode 826971
80	Pembangunan pendistribusian jaringan pipa air bersih (Lanjutan pengadaan Air Minum) Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, kode 826983
81	Pembangunan pendistribusian	Sabintulung	Jumlah	1	Laporan	Usulan POKIR, kode

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
	jaringan pipa air bersih (Pengadaan Tandon Air 500 Liter) Desa Sabintulung		Laporan Kegiatan			826990
82	Peningkatan / pemeliharaan jalan lingkungan (Lanjutan pengurukan alun-alun) Desa Teratak	Teratak	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, kode 827016
83	Rehabilitasi gedung kantor pelayan publik (Rehab Gedung BPU) Desa Muara Kaman Ulu	Muara Kaman Ulu	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, kode 827024
84	Peningkatan/pemeliharaan jembatan lingkungan (Pembangunan jembatan ulin) RT.009 Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, kode 827217
85	Pembangunan turap desa RT.015 Dusun Mulyo Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, kode 827234
86	Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Semenisasi Jalan Musuk Dusun) Dusun Sumber Mulyo Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, kode 827239
87	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Semenisasi jalan) RT.013 Dusun Sumber Agung, Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, kode 827260
88	Normalisasi saluran drainase lingkungan (Rehabilitasi semenisasi) RT.03 Desa Muara Kaman ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, kode 827276
89	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Rehablitasi semenisasi jalan) RT.01 Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827281
90	Peningkatan/pemeliharaan jembatan lingkungan (Pembuatan jembatan beton) RT.10 Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827294
91	Pembangunan Turap Desa jalan tambak malang Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827463
92	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (semenisasi jalan) RT.016 Dusun Sumber Mulyo Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827303
93	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Peningkatan jalan) RT.015 Dusun Sumber Mulyo Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827313
94	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (peningkatan badan jalan) RT.010 Dusun Sumber Mulyo Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827320
95	Pembangunan Turap (Turap Batu jalan tambatan perahu) RT.11 Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827330
96	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Lanjutan semenisasi jalan tambatan perahu) RT.11 Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827360
97	Peningkatan/pemeliharaan jembatan lingkungan (Rehabilitasi semenisasi jembatan) RT.010 Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827406
98	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Semenisasi jalan) RT.13 Dusun Sumber Mulyo	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827422

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
	Desa Muara Kaman Ilir					
99	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Semenisasi jalan) Jalan Awang Long Dusun Sumber Agung Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827430
100	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Semenisasi jalan) RT.17Dusun Sumber Agung Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827433
101	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (semenisasi jalan) RT.19 Dusun sumber Agung Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827475
102	Pembangunan Turap Desa (Penurapan batu) RT.15 Dusun Sumber Mulyo Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827535
103	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Semenisasi jalan) Dusun Sumber Mulyo Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827544
104	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (lanjutan semenisasi jalan) Dusun Sumber Agung Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827558
105	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (semenisasi jalan) RT.18 Dusun Sumber Agung Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827568
106	Normalisasi saluran drainase (Pembuatan drainase) RT.18 Dusun Sumber Agung Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827577
107	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Rehabilitasi semenisasi jalan) RT.03 Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827587
108	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Rehabilitasi semenisasi jalan) RT.001 Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827599
109	Peningkatan/pemeliharaan jembatan lingkungan (Pembangunan jembatan beton) RT.010 Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827606
110	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Semenisasi jalan) RT.016 Dusun Sumber Mulyo Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827634
111	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Peningkatan jalan) RT.015 Dusun Sumber Mulyo Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827646
112	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Peningkatan badan jalan) RT.010 Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827665
113	Pembangunan Turap Desa (Penurapan Batu) Jalan tambatan perahu RT.11 Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827691
114	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (lanjutan semenisasi) Jalan tambatan perahu RT.11 Desa Muara Kaman Ilir4	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827712
115	Peningkatan/pemeliharaan	Muara	Jumlah	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
	jembatan lingkungan (Rehabilitasi semenisasi jembatan) RT.10 Desa Muara Kaman Ilir	Kaman Ilir	Laporan Kegiatan			827729
116	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Semenisasi jalan) RT.013 Dusun Sumber Mulyo Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827739
117	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (semenisasi jallan) Jalan Awang Long Dusun Sumber Agung Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827755
118	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Semenisasi jalan)RT.17 Dusun Sumber Agung Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827772
119	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Semenisasi jalan Bukit Jering menuju jalan poros Kota Bangun) RT.2 Desa Bukit Jering	Bukit Jering	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827895
120	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Peningkatan jalan bukit jering menuju jalan muara siran) RT.1 Desa Bukit Jering	Bukit Jering	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827900
121	Pembangunan Turap Desa (Pembangunan turap jalan) Jalan seberang kampung RT.02 Desa Muara Kaman Ulu	Muara Kaman Ulu	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827907
122	Rehabilitasi Gedung Kantor Pelayanan Publik (Rehab Gedung BPU) Desa Muara Kaman Ulu	Muara Kaman Ulu	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 827921
123	Normalisasi saluran drainase RT.24 Dusun Buana Mekar Desa Sidomukti	Sidomukti	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 829482
124	Peningkatan/pemeliharaan jembatan lingkungan (Pembangunan jembatan ulin) RT.01 Desa Tunjungan	Tunjungan	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 867314
125	Peningkatan/pemeliharaan jembatan lingkungan (lanjutan pembangunan jembatan ulin tambak dua dusun mkp) Dusun Kedang Pala Desa Bukit Jering	Bukit Jering	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 867740
126	Pembangunan/rehabilitasi sekretariat organisasi (Pengurukan halan masjid Nurul Iman) Desa Muara Kaman Ulu	Muara Kaman Ulu	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 868320
127	Pembangunan jalan lingkungan (lanjutan turap batu) RT.015 Desa Muara Kaman Ulu	Muara Kaman Ulu	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 868311
128	Peningkatan/pemeliharaan jembatan lingkungan (Semenisasi jembatan ulin) RT.016 Desa Muara Kaman Ulu	Muara Kaman Ulu	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 868330
129	Peningkatan/pemeliharaan jembatan lingkungan (Semenisasi jembatan ulin) RT.003 Desa Kupang Baru	Kupang Baru	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 868337
130	Pembangunan jalan lingkungan (LLanjutan semenisasi) RT.002 Desa Muara Kaman Ulu	Muara Kaman Ulu	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 868351
131	Pembangunan jalan lingkungan (lanjutan turap batu) RT.010 Desa Muara Kaman Ilir	Muara Kaman Ilir	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 868362
132	Peningkatan/pemeliharaan jalan	Teratak	Jumlah	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
	lingkungan (lanjutan semenisasi RT.08 Desa Teratak		Laporan Kegiatan			872357
133	Peningkatan/pemeliharaan jembatan lingkungan (pembangunan jembatan ulin PAUD PERMATA BUNDA Desa Muara Kaman Ulu	Muara Kaman Ulu	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 872435
134	Pembangunan turap desa (turap batu) Desa Muara Kaman Ulu	Muara Kaman Ulu	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 872508
135	Peningkatan/pemeliharaan jembatan lingkungan (lanjutan pembangunan jembatan ulin) RT.01 Desa Tunjungan	Tunjungan	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 872556
136	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (lanjutan semenisasi) RT8 Desa Teratak	Teratak	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 872582
137	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (pengerasan jalan) Desa Menamang Kiri	Menamang Kiri	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 872763
138	Pembangunan jalan lingkungan desa (semenisasi jalan) RT.05 Desa Menamang Kanan	Menamang Kanan	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 872869
139	Pembangunan jalan lingkungan (Lanjutan semenisasi gang bola blok L) Desa Sidomukti	Sidomukti	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 873058
140	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Pengerasan badan jalan) Dusun Suka Jaya Desa Panca Jaya	Panca Jaya	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 873128
141	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Pengerasan jalan usaha tani) RT.018 Desa Bunga Jadi	Bunga Jadi	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 874598
142	Pembangunan jalan lingkungan (semenisasi jalan lingkungan) Desa Lebaho Ulaq	Lebaho Ulaq	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 874760
143	Pembangunan pendistribusian jaringan pipa air bersih (Pembuatan penampungan air bersih dan sumur bor) Desa Lebaho Ulaq	Lebaho Ulaq	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 876275
144	Pembangunan taman pendidikan Alquran (TPA) AL-TAQWA RT.010 Dusun Aji Bidara Putih Desa Muara Kaman Ulu	Muara Kaman Ulu	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 885494
145	Pembangunan jalan lingkungan (Pembangunan jembatan gang) Dusun Delta Mahakam RT.018 Dusun Aji Bidara Putih Desa Muara Kaman Ulu	Muara Kaman Ulu	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 884486
146	Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan (Semenisasi jalan kuburan baru) RT.015 Dusun Aji Bidara Putih Desa Muara Kaman Ulu	Muara Kaman Ulu	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 884501
147	Pembangunan jalan lingkungan (semenisasi jalan) Desa Sabintulung	Sabintulung	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Usulan POKIR, Kode 885867
148	Pengadaan Tandon Air Bersih Desa Menamang Kanan	Menamang Kanan	Jumlah Laporan Kegiatan	1	Laporan	Belum tersedianya Jaringan / penyaluran air bersih Desa Menamang Kanan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Agenda Pembangunan Nasional merupakan bagian penting untuk diintegrasikan dalam penyusunan Renja Kelautan dan Perikanan. Agenda Pembangunan Nasional tercermin dari Visi Presiden Yaitu : Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong.

Upaya untuk mewujudkan visi ini melalui 9 Misi Pembangunan, dengan 2 Misi menjadi bagian dari pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang selaras dengan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Pengelolaan Pemerintah Yang Bersif, Efektif dan Terpercaya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Muara Kaman.

Mencermati tantangan dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Kaman, serta mengacu pada target kinerja pembangunan yang tertuang dalam RENSTRA Kecamatan Muara Kaman, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Muara KJaman adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara Tahun 2024.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja sasaran
2	Meningkatkan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel		Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	87,07
		Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	95
			Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90
			Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	100
			Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	100

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Keccamatan Muara Kaman Tahun Rencana 2025, Rencana Program dan Kegiatan Tahun Rencana 2025 disusun dengan memperhatikan :

a. Pencapaian Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara 2021-2026; khusunya pada Program Kesejahteraan sosial.
b. Pencapaian tugas pokok dan fungsi Kecamatan Muara Kaman yang telah termuat dalam Renstra Kecamatan Muara Kaman 2021-2026.
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020
d. Pencapaian Pembangunan berkelanjutan, Pengentasan Kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi Desa/ Kecamatan, pertumbuhan PAD Desa/Kecamatan.;
e. Proses Analisis Hasil Evaluasi
f. Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

Program dan Kegiatan Kecamatan Muara Kaman Tahun Rencana 2025 direncanakan berjumlah 6 Program, 16 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran yang direncanakan sebesar Rp50.988.523.691,-.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Rencana 2025, secara rinci dsampaikan dalam tabel berikut:

Tabel TC.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Muara Kaman Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten kutai Kartanegara.

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Prioritas	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5		6	7	8		9
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN					25,299,530,817				54,758,523,691
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kec. Muara Kaman		Angka	11,758,930,817			Angka	11,833,523,691
7	1	1	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Muara Kaman	21	Dokumen	605,000,000		18	Dokumen	230,000,000
7	1	1	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Muara Kaman	3	Dokumen	140,000,000	Penambahan Anggaran, menyesuaikan dengan penambahan kinerja (Dokumen Renstra).	2	Dokumen	100,000,000
					Dokumen Renja 2026 Kec. Muara Kaman					*30,000,000.00*				*50,000,000*
					Dokumen Perubahan Renja 2025 Kec. Muara Kaman					*10,000,000.00*				*50,000,000*
					Dokumen Renstra 2025-2030					*100,000,000.00*				-
7	1	1	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	Kec. Muara Kaman	1	Dokumen	5,000,000.00	Sub Kegiatan diperlukan untuk memfasilitasi penyusunan RKA.	1	Dokumen	15,000,000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Prioritas	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5		6	7	8		9
					Dokumen RKA 2026 Kec. Muara Kaman					*5,000,000.00*				*15,000,000*
7	1	1	2.01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	Kec. Muara Kaman	1	Dokumen	5,000,000.00	Sub Kegiatan diperlukan untuk memfasilitasi penyusunan Perubahan RKA.	1	Dokumen	*15,000,000*
					Dokumen Perubahan RKA 2025 Kec. Muara Kaman					*5,000,000.00*				*15,000,000*
7	1	1	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Muara Kaman	12	Laporan	70,000,000.00	Mendukung pencapaian kinerja SAKIP Kec. Muara Kaman	12	Laporan	40,000,000
					Laporan Capaian Kinerja Kec. Muara Kaman					*70,000,000.00*				*40,000,000*
7	1	1	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1	Laporan	60,000,000.00	Sub Kegiatan diperlukan untuk Evaluasi Pelaksanaan Renstra, sebagai bahan penyusunan Renstra 2025-2030.	0	Laporan	60,000,000
					Dokumen Evaluasi Kinerja					*60,000,000.00*				*60,000,000*

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Prioritas	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5		6	7	8		9
7	1	1	2.01	09	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		200	Data	300,000,000.00				300,000,000.00
					Satu Data (Becik)					*50,000,000.00*				*50,000,000.00*
					Kecamatan sebagai pusat data (operasional, Honorarium, Peralatan, pendampingan teknis)					*250,000,000.00*				*250,000,000.00*
7	1	1	2.01	10	Sub KegiatanPelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		25	BA	25,000,000.00				25,000,000.00
					Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)					*25,000,000.00*				*25,000,000*
7	1	1	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Kec. Muara Kaman	15	Laporan	8,214,682,762		25	Laporan	8,809,773,691
7	1	1	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Muara Kaman	61	Orang/Bulan	8,007,878,362.00	Penambahan pagu menyeseuaikan dengan pagu N-1	61	Orang/Bulan	8,549,773,691
					Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Muara Kaman					*8,007,878,362.00*				*8,549,773,691*
7	1	1	2.0	05	Sub Kegiatan Koordinasi	Jumlah Laporan	Kec. Muara	1	Laporan	10,000,000.00	Diperlukan	1	Laporan	10,000,000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Prioritas	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5		6	7	8		9
			2		dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Kaman				dalam memfasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan.			
					Laporan Keuangan Akhir Tahun 2025 Kec. Muara Kaman					*10,000,000.00*				*10,000,000*
7	1	1	2.02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kec. Muara Kaman	12	Laporan	171,804,400.00	Penambahan Alokasi Anggaran, tersedia hanya untuk pembayaran honor pengelola keuangan selama 6 Bulan.	12	Laporan	250,000,000
					Laporan Keuangan Bulanan Kec. Muara Kaman					*171,804,400.00*				*250,000,000*
7	1	1	2.02	08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		*1*	Dokumen	25,000,000.00				
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					*25,000,000.00*				
7	1	1	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Kec. Muara Kaman	639	Unit	295,000,000		639	Unit	195,000,000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Prioritas	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5		6	7	8		9
7	1	1	2.03	01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Muara Kaman	1	Dokumen	25,000,000.00	Diperlukan dalam upaya penataan aset.	1	Dokumen	20,000,000
					Dokumen RKBMD Kec. Muara Kaman					*25,000,000.00*				*20,000,000*
7	1	1	2.03	02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Muara Kaman	1	Dokumen	150,000,000.00	Diperlukan dalam upaya penataan aset.	1	Dokumen	150,000,000
					Pengamanan Aset Kec. Muara Kaman.					*150,000,000.00*				*150,000,000*
7	1	1	2.03	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1	Laporan	50,000,000.00				50,000,000.00
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					*50,000,000.00*				*50,000,000*
7	1	1	2.03	5	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Muara Kaman	2	Laporan	30,000,000.00	Penyesuaian anggaran (Pengurangan) berdasarkan hasil analisis kebutuhan.	2	Laporan	25,000,000
					Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Kec. Muara Kaman Semester 1					*15,000,000.00*				*12,500,000*
					Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Kec. Muara Kaman Semester 2					*15,000,000.00*				*12,500,000*
7	1	1	2.03	6	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang			*12*	Laporan	40,000,000.00				40,000,000.00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Prioritas	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5		6	7	8		9
					Milik Daerah Pada SKPD									
					Pembayaran Honorarium Pengelola BMD					*40,000,000.00*				*40,000,000*
7	1	1	2.05		Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian.	Kec. Muara Kaman	4	Layanan	450,000,000		3	Layanan	250,000,000
7	1	1	2.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Kec. Muara Kaman	1	Paket	200,000,000.00	Belum pernah ada pengadaan pakaian miskat di Kantor Kec. Muara Kaman.	0	Paket	-
					Pakaian Miskat					*200,000,000.00*				-
7	1	1	2.05	03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Muara Kaman	1	Dokumen	50,000,000.00	Paket Usulan Baru dalam rangka mengadministrasi (Update) data kepegawaian berdasarkan mekanisme dan format terbaru.	1	Dokumen	50,000,000
					Dokumen Kepegawaian					*50,000,000.00*				*50,000,000*
7	1	1	2.05	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian.	Kec. Muara Kaman	1	Dokumen	50,000,000.00	Diperlukan dalam upaya perbaikan kinerja ASN.	1	Dokumen	50,000,000
					Koordinasi Kepegawaian dengan BKPSDM					*50,000,000.00*				*50,000,000*
7	1	1	2.05	05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		12	Dokumen	50,000,000.00	Diperlukan dalam upaya meningkatkan kinerja ASN.	12	Dokumen	50,000,000
					Dokumen Evaluasi dan Penilaian Kinerja					*50,000,000.00*				*50,000,000*

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Prioritas	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5		6	7	8		9
					Pegawai									
7	1	1	2.05	9	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.	Kec. Muara Kaman	20	Orang.	100,000,000.00	Diperlukan dalam upaya memenuhi target pelatihan ASN Minimal 20 Jam/Tahun.	20	Orang.	100,000,000
					Pendidikan dan Pelatihan ASN Kec. Muara Kaman					*100,000,000.00*				*100,000,000*
7	1	1	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Kec. Muara Kaman	15	Unit	328,750,000		15	Unit	653,750,000
7	1	1	2.06	2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Muara Kaman	1	Paket	50,000,000.00	Sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan optimaliasasi kegiatan Kecamatan Muara Kaman.	1	Paket	100,000,000
					ATK					*50,000,000.00*				100,000,000
7	1	1	2.06	3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Muara Kaman	1	Paket	12,000,000.00	Penyesuaian (Penghapusan) anggaran, Peralatan rumah tangga Kantor camatan memadai.	0	Paket	-
					Paket Peralatan Rumah Tangga untuk Rumah Dinas.					*12,000,000.00*				-
7	1	1	2.06	4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Muara Kaman	2	Paket	33,750,000.00	Sesaui Perencanaan Awal	2	Paket	33,750,000
					Makan Minum Persediaan Kantor.(Pakan Natuna)					*31,750,000.00*				*31,750,000*

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Prioritas	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5		6	7	8		9
					Paket Alat Kebersihan Kantor					*2,000,000.00*				*2,000,000*
7	1	1	2.06	5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Muara Kaman	1	Paket	20,000,000.00	Sesaui Perencanaan Awal	1	Paket	20,000,000
					Paket Barang Cetakan dan Penggandaan					*20,000,000.00*				*20,000,000*
7	1	1	2.06	8	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Muara Kaman	12	Laporan	13,000,000.00	Penambahan Anggaran, mengikuti tingginya aktifitas kunjungan tamu	12	Laporan	100,000,000
					Penyediaan Makan dan Minum Tamu					*13,000,000.00*				*100,000,000*
7	1	1	2.06	9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Muara Kaman	100	Laporan	150,000,000.00	Penambahan anggaran, menyesuaikan dengan meningkatnya kegiatan koordinasi antar perangkat daerah.	100	Laporan	350,000,000
					Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi					*150,000,000.00*				*350,000,000*
7	1	1	2.06	10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Muara Kaman	1	Dokumen	50,000,000.00	Sesuai Perencanaan awal, Diperlukan untuk Fasilitasi penatusahaan arsip.	1	Dokumen	50,000,000
					Dokumen Penatausahaan Arsip					*50,000,000.00*				*50,000,000*
7	1	1	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Muara Kaman	11	Unit	525,000,000		11	Unit	-

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Prioritas	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5		6	7	8		9
					Pemerintah Daerah	Daerah yang disediakan								
7	1	1	2.07	5	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Disediakan	Kec. Muara Kaman	2	Paket	500,000,000.00	Kondisi Meja dan kursi Kerja kantor Kurang Layak.	0	Paket	-
					Paket Meja Kerja					*350,000,000.00*				-
					Paket Kursi Kkerja					*150,000,000.00*				-
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Muara Kaman	1	Unit	25,000,000.00	Penghapusan Anggaran, Peralatan dan mesin lainnya cukup.	0	Unit	-
					Peralatan Genset					*25,000,000.00*				-
7	1	1	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Muara Kaman	12	Bulan	971,334,344.00		12	Bulan	945,000,000.00
7	1	1	2.08	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Muara Kaman	12	Laporan	5,000,000.00		12	Laporan	5,000,000
					Laporan Kegiatan Surat Menyurat					*5,000,000.00*	Sesuai Perencanaan awal, Diperlukan untuk Fasilitasi Surat menyurat.			*5,000,000*
7	1	1	2.08	2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Muara Kaman	12	Laporan	261,060,000.00		12	Laporan	265,000,000
					Laporan Pembayaran Listrik, Air, Internet					*261,060,000.00*				*265,000,000*

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Prioritas	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5		6	7	8		9
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Muara Kaman	1	Laporan	30,000,000.00	Penghapusan anggaran, Penyediaan Jasa Peralatan Kantor tidak urgen.	0	Laporan	-
					Jasa Peralatan Kantor					*30,000,000.00*				-
7	1	1	2.08	4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Muara Kaman	12	Laporan	675,274,344.00	Mengacu pada anggaran N-1.	12	Laporan	675,000,000
					Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Non ASN					*675,274,344.00*				*675,000,000*
7	1	1	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kec. Muara Kaman	31	Unit	369,163,711		13	Unit	750,000,000
7	1	1	2.09	2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Muara Kaman	11	Unit	228,500,000.00	Penambahan anggaran, menyesuaikan dengan penambahan kinerja.	11	Unit	250,000,000
					Pemeliharaan Kendaraan. Dinas Roda 4 dan Roda 2.					*228,500,000.00*				*250,000,000*
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Muara Kaman	1	Unit	15,000,000.00	Penghapusan anggaran, Tidak urgen dianggarkan.	*0*	Unit	-
					Pemeliharaan Peralatan lainnya					*15,000,000.00*				-

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Prioritas	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5		6	7	8		9
7	1	1	2.09	9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Muara Kaman	3	Unit	115,663,711.00	Kondisi Rumah Dinas Kantor Kec. Muara Kaman Kurang Layak Huni	2	Unit	500,000,000
					Rehab Rumah Dinas Kec. Muara Kaman					*115,663,711.00*				*500,000,000*
7	1	1	2.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kec. Muara Kaman	1	Unit	10,000,000.00	Sangat diperlukan mengingat kondisi beberapa sarana gedung kantor yang sudah tidak layak.	0	Unit	-
					Pagar, Parkir, Halaman, dll					*10,000,000.00*				-
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Kec. Muara Kaman	60	Persen	11,899,600,000		60	Persen	41,800,000,000
						Tingkat aksebilitas wilayah kecamatan		60	Persen			60	Persen	
7	1	2	2.01		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi				400,000,000.00				400,000,000.00
7	1	2	2.01	01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal		2	Laporan	150,000,000.00				150,000,000.00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Prioritas	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5		6	7	8		9
						Terkait								
					Stunting (REMBUK, OPERASIONAL TPPS KECAMATAN)					*50,000,000.00*	Mendukung Penanganan Stunting			*50,000,000.00*
					Fasilitasi Kegiatan Erau					*100,000,000.00*	Agenda Rutin Tahunan			*100,000,000.00*
7	1	2	2.01	02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1	Dokumen	250,000,000.00				250,000,000.00
					HUT RI Di Kecamatan					*250,000,000.00*				*250,000,000*
7	1	2	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Kec. Muara Kaman	2	SPM	300,000,000		2	SPM	200,000,000
2	1	2	2.02	01	Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan.	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan.	Kec. Muara Kaman	1	Dokumen	100,000,000.00	Diperlukan dalam upaya mendukung pelaksanaan Inovasi PAK DIANSA..	0	Dokumen	-
					Pembuatan Aplikasi Pelayanan on_Line Kecamatan.					*100,000,000.00*				-

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Prioritas	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5		6	7	8		9
7	1	2	2.02	2	Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Desa Muara Kaman Ulu	2	Laporan	100,000,000.00		2	Laporan	100,000,000
					Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik Standar Pelayanan					*25,000,000.00*	Merupakan Agenda Rutin yang Wajib dilaksanakan setiap Tahun			*50,000,000*
					Bimbingan Teknis Petugas Layanan Kecamatan (Service Exelent).					*75,000,000.00*	Mengupdate Kapasitas Petugas Layanan			*50,000,000*
7	1	2	2.02	3	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningakatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Muara Kaman	2	Laporan	100,000,000		3	Laporan	100,000,000
					Operasional Pokjanal Posyandu					*50,000,000.00*	Mendukung Program Stunting			50,000,000
					Pramuka					*50,000,000.00*				50,000,000
7	1	2	2.04		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kec. Muara Kaman	55	Kegiatan	11,199,600,000		159	Kegiatan	41,200,000,000
7	1	2	2.04	2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec. Muara Kaman	5	Laporan	*984,600,000*		5	Laporan	*1,200,000,000*
					Pemeliharaan LPJU					*64,600,000.00*	Paket usulan			*300,000,000*

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Prioritas	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5		6	7	8		9
											pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan dari Dishub.			
					Pengelolaan Sampah Kec. Muuara Kaman					*550,000,000.00*	Paket usulan dalam rangka pengelolaan sampah di Kecamatan Muara Kaman, Pelimpahan kewenangan dari DLHK			*500,000,000*
					Pemeliharaan Situs dan Museum.					*150,000,000.00*	Paket usulan dalam upaya pemeliharaan SITUS dan Museum yang asetnya telah dilimpahkan ke Kecamatan oleh Dinas Pendidikan.			*200,000,000*
					Penanganan Darurat Bencana / Bantuan Logistik Masyarakat Terdampak					*150,000,000.00*	Memfasilitasi masyarakat terdampak bencana alam, bagian dari pelaksanaan pelimpahan kewenangan.			*150,000,000*
					Fasilitasi Paten					*70,000,000.00*				*50,000,000*
7	1	2	2.04	3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan	20 Desa	50	Laporan	10,215,000,000.	Mendukung "Program	200	Laporan	40,000,000,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Prioritas	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5		6	7	8		9
					Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				00	Pemantapan Konektivitas Antar Wilayah			0
					Pembangunan Turap RT.02 Desa Muara Kaman Ulu		*Muara Kaman Ulu*			*200,000,000.00*	Usulan Musrenbang, Kode 1252655			-
					Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Tunjungan		*Tunjungan*			*200,000,000.00*	Usulan Musrenbang, Kode 1339344			-
					Rehabilitasi Gedung Kantor Pelayanan Publik Desa Bunga Jadi		*Bunga Jadi*			*200,000,000.00*	Usulan Musrenbang, Kode 1343777			-
					Pembangunan/peningkatan jalan jembatan ulin Dusun Delta Mahakam, Desa Muara Kaman Ulu		*Muara Kaman Ulu*			*200,000,000.00*	Usulan Musrenbang, Kode 1364897			-
					Normalisasi saluran drainase lingkungan jalan poros desa RT.006 Desa Puan Cepak		*Puan Cepak*			*200,000,000.00*	Usulan Musrenbang, Kode 1376053			-
					Pembangunan jalan lingkungan desa RT.003 Desa Lebaho ulaq		*Lebaho Ulaq*			*200,000,000.00*	Usulan Musrenbang, Kode 1405246			-
					Pembuatan tempat sampah penampungan sementara Desa Benua Puhun		*Benua Puhun*			*200,000,000.00*	Usulan Musrenbang, Kode 1427921			-
					Pembuatan tempat sampah penampungan sementara jalan poros desa RT.006 Desa Puan Cepak		*Puan Cepak*			*250,000,000.00*	Usulan Musrenbang, Kode 1378182			-

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Prioritas	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5		6	7	8		9
					Pembangunan pendistribusian jaringan pipa air bersih (Pengadaan Tandon Air) Desa Menamang Kiri		*Menamang Kiri*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR, kode 760605			-
					PEMBUATAN DRAINASE RT.16 DESA SIDOMUKTI KECAMATAN MUARA KAMAN		*Sidomukti*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					PEMBUATAN DRAINASE RT.30 DESA SIDOMUKTI KECAMATAN MUARA KAMAN		*Sidomukti*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					PEMBUATAN DRAINASE RT.21 DESA SIDOMUKTI KECAMATAN MUARA KAMAN		*Sidomukti*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					Pembuatan Parit RT.03 Desa Teratak Kecamatan Muara Kaman		*Teratak*			*220,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					Pembuatan Parit RT.04 Desa Teratak Kecamatan Muara Kaman		*Teratak*			*220,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					Normalisasi Parit Tanjung Asam Desa Teratak Kecamatan Muara Kaman		*Teratak*			*220,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					Semenisasi Jalan dan drainase RT 24 Dusun Buana Mekar Desa Sidomukti		*Teratak*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Prioritas	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5		6	7	8		9
					Pembangunan Jembatan ulin PAUD PERMATA BUNDA Desa Muara Kaman Ulu		*Muara Kaman Ulu*			*225,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					Turap Batu Desa Muara Kaman Ulu, Kab. Kutai Kartanegara		*Muara Kaman Ulu*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					Lanjutan Pembangunan Jembatan Ulin RT 01 Desa Tunjungan, Kab. Kutai Kartanegara		*Tunjungan*			*250,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					Lanjutan Semenisasi RT 8 Desa Teratak, Kab. Kutai Kartanegara		*Teratak*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					PENERANGAN LAMPU JALAN TENAGA SURYA DESA MENAMANG KIRI		*Menamang Kiri*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					Pengerasan Jalan Desa Menamang Kiri, Kab. Kutai Kartanegara		*Menamang Kiri*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					Semenisasi Jalan RT 05 Desa Menamanag Kanan		*Menamang Kanan*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					LANJUTAN SEMENISASI GANG BOLA BLOK L DESA SIDOMUKTI		*Muara Kaman Ilir*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					PENGERASAN BADAN JALAN DUSUN SUKA JAYA DESA PANCA JAYA		*Panca Jaya*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					PENGERASAN JALAN USAHA TANI RT.018 DESA BUNGA JADI		*Bunga Jadi*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Prioritas	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5		6	7	8		9
					SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN DESA LEBAHO ULAQ		*Lebaho Ulaq*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					Pembuatan Penampungan Air Bersih Dan Sumur Bor Desa Lebaho Ulaq Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara		*Lebaho Ulaq*			*210,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					Semenisasi Jalan Desa Sabintulung Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara		*Sabintulung*			*220,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					Pengurukan Halaman Masjid Nurul Iman Desa Muara Kaman Ulu, Kab. Kutai Kartanegara		*Muara Kaman Ulu*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					Semenisasi Jembatan Ulin RT. 016 Desa Muara Kaman Ulu, Kab. Kutai Kartanegara		*Muara Kaman Ulu*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					Semenisasi Jembatan Ulin RT. 003 Desa Kupang Baru, Kab. Kutai Kartanegara		*Muara Kaman Ulu*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					Lanjutan Semenisasi RT. 002 Desa Muara Kaman Ulu, Kab. Kutai Kartanegara		*Muara Kaman Ulu*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					Pembangunan Jembatan Gang Dusun Delta Mahakam Rt. 018 Dusun Aji Bidara Putih Desa Muara Kaman Ulu Kec.		*Muara Kaman Ulu*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Prioritas	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5		6	7	8		9
					Muara Kaman									
					Semenisasi Jalan Kuburan Baru Rt. 015 Dusun Aji Bidara Putih Desa Muara Kaman Ulu Kec. Muara Kaman		*Muara Kaman Ulu*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					Pembangunan TPA AL-TAQWA Rt. 010 Dusun Aji Bidara Putih Desa Muara Kaman Ulu Kec. Muara Kaman		*Muara Kaman Ulu*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					Peningkatan Badan jalan Dusun Dusun danau Baru , Desa Menamang Kiri Kec.Muara Kaman		*Menamang Kiri*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					Lanjutan Semenisasi Jalan Dusun Sumber Agung Desa Muara Kaman ilir, Kab. Kutai Kartanegara		*Muara Kaman Ilir*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					Pembuatan Drainase RT. 18 Dusun Sumber Agung Desa Muara Kaman ilir, Kab. Kutai Kartanegara		*Muara Kaman Ilir*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					Pembangunan Jembatan Beton RT.010 Desa Muara Kaman Ilir, Kab. Kutai Kartanegara		*Muara Kaman Ilir*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Prioritas	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5		6	7	8		9
					Semenisasi Jalan RT. 016 Dusun Sumber Mulyo Desa Muara kaman ilir, Kab. Kutai Kartanegara		*Muara Kaman Ilir*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					Peningkatan Jalan RT. 015 Dusun Sumber Mulyo Desa Muara Kaman ilir, Kab. Kutai Kartanegara		*Muara Kaman Ilir*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					Peningkatan Badan Jalan RT. 010 Desa Muara Kaman Ilir, Kab. Kutai Kartanegara		*Muara Kaman Ilir*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					Lanjutan Semenisasi Jalan Tambatan Perahu RT. 11 Desa Muara Kaman Ilir, Kab. Kutai Kartanegara		*Muara Kaman Ilir*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					Rehabilitasi Semenisasi Jembatan RT. 10 Desa Muara Kaman ilir, Kab. Kutai Kartanegara		*Muara Kaman Ilir*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					Semenisasi Jalan RT. 013 Dusun Sumber Mulyo Desa Muara Kaman Ilir, Kab. Kutai Kartanegara		*Muara Kaman Ilir*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					Semenisasi Jalan Jalan Awang Long Dusun Sumber Agung Desa Muara Kaman ilir, Kab. Kutai Kartanegara		*Muara Kaman Ilir*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Prioritas	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5		6	7	8		9
					Semenisasi Jalan RT. 17 Dusun Sumber Agung Desa Muara Kaman Ilir, Kab. Kutai Kartanegara		*Muara Kaman Ilir*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					Semenisasi Jalan Bukit Jering Menuju Jalan Poros Kota Bangun RT. 2 Kecamatan Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara		*Bukit Jering*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
					Peningkatan Jalan Bukit Jering Menuju Jalan Muara Siran RT. 1 Kecamatan Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara		*Bukit Jering*			*200,000,000.00*	Usulan POKIR,			-
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif	Kec. Muara Kaman	80	Persen	786,000,000		80	Persen	375,000,000
7	1	3	2.01		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kec. Muara Kaman	20	Koordinasi	100,000,000.00		20	Koordinasi	175,000,000
7	1	3	2.01	1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Desa Muara Kaman Ilir	10	Lembaga	50,000,000.00	Alokasi anggaran kegiatan pra musrenbang dan musrenbang kecamatan tidak mencukupi.	10	Lembaga	100,000,000
					Pelaksanaan Forum Musyawarah Pembangunan Desa					*50,000,000.00*				*100,000,000*

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Prioritas	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5		6	7	8		9
7	1	3	2.01	3	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Desa Muara Kaman Ulu, Desa Muara Kaman Ilir.	2	Laporan	50,000,000	Kegiatan Rutin yang dilaksanakan di Kecamatan belum teranggarkan	9	Laporan	75,000,000
					FASILITASI LOMBA KELURAHAN DAN DESA					*25,000,000.00*				*50,000,000.00*
					BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)					*25,000,000.00*				*25,000,000.00*
7	1	3	2.03		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasayarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasayarakatan di Berdayakan		5	Lembaga Kemasayarakatan	486,000,000.00				486,000,000.00
7	1	3	2.03	01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		5	Lembaga Kemasayarakatan	486,000,000				486,000,000
					Honor LINMAS					*186,000,000.00*				*186,000,000.00*
					Fasilitasi Kegiatan HKG-PKK (Seluruh Kecamatan)					*150,000,000.00*				*150,000,000.00*
					Operasional PKK					*100,000,000.00*				*100,000,000.00*
					Forum Anak					*20,000,000.00*				*20,000,000.00*
					Jambore PAUD					*30,000,000.00*				*30,000,000.00*
7	1	3	2.06		Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan emberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat	Kec. Muara Kaman	4	Kegiatan	200,000,000.00		4	Kegiatan	200,000,000.00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Prioritas	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5		6	7	8		9
						Kecamatan dan Kelurahan								
7	1	3	2.06	'03	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec. Muara Kaman	500	Keluarga	50,000,000.00	Mendukung pelaksanaan program penanggulangan Kemiskinan di Kec. Muara Kaman	500	Keluarga	50,000,000
					Fasilitasi Distribusi Pangan Keluarga Pra Sejahtera.					*50,000,000.00*				*50,000,000*
7	1	3	2.06	'05	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kec. Muara Kaman	500	Keluarga	50,000,000.00	Mendukung pelaksanaan program penanggulangan Kemiskinan di Kec. Muara Kaman	500	Keluarga	50,000,000
					Updating Data RTLH Kec. Muara Kaman					*50,000,000.00*				*50,000,000*
7	1	3	2.06	'07	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapka Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec. Muara Kaman	1000.00	Kelauraga	50,000,000.00	Mendukung pelaksanaan program penanggulangan Kemiskinan di Kec. Muara Kaman	1,000	Kelauraga	50,000,000
					Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					*50,000,000.00*				*50,000,000*

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Prioritas	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5		6	7	8		9
7	1	3	2.06	'12	Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec. Muara Kaman	1500	Keluarga	50,000,000.00	Mendukung pelaksanaan program penanggulangan Kemiskinan di Kec. Muara Kaman	1,500	Keluarga	50,000,000
					Update Data DTKS.					*50,000,000.00*				*50,000,000*
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi	Kec. Muara Kaman	80	Persen	200,000,000.00		80	Persen	225,000,000
7	1	4	2.01		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Muara Kaman	4	Kegiatan	200,000,000.00		4	Kegiatan	225,000,000
7	1	4	2.01	1	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Desa Muara Kaman Ulu	2	Laporan	25,000,000.00	Mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban di masyarakat	2	Laporan	25,000,000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Prioritas	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5		6	7	8		9
					Kegiatan Rapat Sinergitas dengan Instansi Vertikal di Kecamatan.					*25,000,000.00*				*25,000,000*
7	1	4	2.01	2	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Desa Muara Kaman Ulu	4	Laporan	175,000,000	Penambahan Kinerja pelaksanaan Forum Pembaruan Kebangsaan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Pelimpahan dari Kesbangpol	2	Laporan	200,000,000
					Laporan Kegiatan Harmonisasi (Fasilitasi FKUB,Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)					*75,000,000.00*				*50,000,000*
					Safari Ramadhan					*100,000,000.00*				*150,000,000*
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Muara Kaman	80	Persen	325,000,000		80	Persen	375,000,000
7	1	5	2.01		Kegitan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kec. Muara Kaman	2	Urusan	325,000,000		2	Urusan	375,000,000
7	1	5	2.01	4	Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan	Desa Muara Kaman Ulu	200	Orang	300,000,000	Paket Pembinaan / Sosialisasi tidak diberi anggaran. Periode selanjutnya sebaiknya dialokasikan.	200	Orang	350,000,000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Prioritas	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5		6	7	8		9
						Lokal, Regional, dan Nasional								
					Kegiatan Pembinaan / Sosialisasi					-				*50,000,000*
					Fasilitasi Kegiatan MTQ					*300,000,000.00*				*300,000,000*
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Desa Muara Kaman Ulu	1	Dokumen	25,000,000		1	Dokumen	25,000,000
					Rapat Forum Koordinasi					*25,000,000.00*				*25,000,000*
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Kec. Muara Kaman	45	Persen	330,000,000.00		45	Persen	150,000,000.00
7	1	6	2.01		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Kec. Muara Kaman	20	Desa	330,000,000.00		20	Desa	150,000,000.00
7	1	6	2.01	3	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Desa (Sidomukti, Cipari Makmur, Panca Jaya, Bunga Jadi, Teratak, Benu	20	Dokumen	100,000,000		20	Dokumen	100,000,000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Prioritas	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5		6	7	8		9
							Puhun, Rantau Hempang, Lebaho Ulaq, Muara Kaman Ilir, Muara Kaman Ulu, Muara Siran, Bukit Jering, Kupang Baru, Sabintulung, Tunjungan, Liang Buaya, Sedulang, Puan Cepak, Menamang Kanan, Menamang Kiri							
					Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa					*50,000,000.00*	Mendukung pencapaian peningkatan status IDM			*50,000,000*
					Monitoring Pengelolaan APBDes					*50,000,000.00*				*50,000,000*
7	1	6	2.01	07	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Desa Muara Kaman Ulu	6	Dokumen	30,000,000.00		*5*	Dokumen	-

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Prioritas	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5		6	7	8		9
						Badan Permusyawaratan Desa.								
					Dokumen Fasilitasi Pemilihan BPD.					*30,000,000.00*	Usulan Paket Baru, mendukung pelaksanaan pemilihan BPD di 5 Desa tahun 2025			-
7	1	6	2.01	15	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Kec. Muara Kaman	1	Dokumen	150,000,000.00				-
					Penyusunan Profil Desa Kecamatan Muara Kaman					*150,000,000.00*	Usulan Paket Baru, belum tersedianya profil desa se Kecamatan Muara Kaman.			-
7	1	6	2.01	17	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	20 Desa (Sidomukti, Cipari Makmur, Panca Jaya, Bunga Jadi, Teratak, Benu Puhun, Rantau Hempang, Lebaho	20	Laporan	50,000,000.00		20	Laporan	50,000,000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Prioritas	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5		6	7	8		9
							Ulaq, Muara Kaman Ilir, Muara Kaman Ulu, Muara Siran, Bukit Jering, Kupang Baru, Sabintulung, Tunjungan, Liang Buaya, Sedulang, Puan Cepak, Menamang Kanan, Menamang Kiri							
					Laporan Kegiatan Pendampingan Desa					*50,000,000.00*	Paket sesuai perencanaan awal, upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa.			*50,000,000*

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Rencana 2025 merupakan tahun ke 4 (empat) dalam pelaksanaan rencana strategis periode 2021-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih seperti tercantum dalam RPJMD 2021-2026 dan merupakan tugas dan fungsi serta kewenangan Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.

1. Optimalisasi pada aspek waktu dan alokasi anggaran dalam proses pelaksanaan merupakan Tantangan utama Rencana Kerja (Renja) 2025. Keterbatasan waktu pelaksanaan menjadi fokus utama penanganan sehingga target kinerja tetap mampu direalisasikan. Keterbatasan alokasi anggaran juga menjadi perhatian penting dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P_Renja) 2024 terutama dalam hal mengkalkulasi target utama dan prioritas yang harus direalisasikan.
2. Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Muara Kaman Periode Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja Renstra 2021-2026, yang pencapaiannya secara periodik tetap terjaga dengan baik, berdasarkan hasil evaluasi.
3. Rumusan rencana program dan kegiatan pada periode selanjutnya akan lebih memperhatikan program prioritas Dedikasi Kukar Idaman, Pencapaian Standar Pelayanan, Penunjang program Propinsi dan Nasional serta capaian kinerja yang belum maksimal Agar konsistensi pencapaian kinerja sejalan dengan target kinerja Renstra

Rencana Kerja Kecamatan Muara Kaman Tahun Rencana 2025 ini merupakan pedoman/acuan bagi Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegar dalam menjalankan tugas dan fungsi serta cerminan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Rencana 2025 dalam mewujudkan visi dan Misi Kepala Daerah. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara tahun rencana 2025 akan sangat dipengaruhi oleh peran dan tanggungjawab seluruh komponen organisasi pada Kecamatan Muara Kaman, serta *stakeholder* yang terkait.

ss.RENJA KECAMATAN SEBULU

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serrta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 ini berpedoman pada Rencana Strategis Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 dengan mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat serta disenergikan Program dan Kegiatan SKPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 – 2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026.

Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, maka disusunlah Renja Kantor Kecamatan Sebulu sebagai satu bagian yang utuh dari manajeman kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara substansial Renja Kantor Kecamatan Sebulu memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan dengan Indikator yang akan dijalankan , dan dalam pelaksanaannya akan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia serta hal-hal lain yang dianggap penting.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan akhir Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD.

a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum Musrenbangdes.
b. Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa / Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
c. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan Riel masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing OPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan dalam menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9 Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10 Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

14 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

15 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

16 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

   Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Sebulu selama tahun 2025 dengan berpedoman pada Rancangan RKPD dan Renstra Kecamatan.

2. Tujuan :

   Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Camat Sebulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja-PD adalah Dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam penyusunannya, Renja-PD harus mengacu pada Rancangan Renstra-PD dan Ranangan RKPD.

Renja Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulsan

BAB II. EVALUSI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD.

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakankebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Sebulu telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya dan telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu:

a. Menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Awal Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.
b. Menyusun Rencana Kerja Awal Perangkat Daerah

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Sebulu Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Sebul Tahun 2023 terhadap capaian Renstra Kecamatan Sebulu Tahun 2021-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Sebulu sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2023 terhadap target di Tahun 2024. Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Sebulu Tahun 2021-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra Kecamatan Sebulu 2021-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel T – C.29.

REKAFITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA DAERAH s/d TAHUN 2024

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SEBULU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Renja - PD Tahun (2022)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)				Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)		
											Target Renja-PD Tahun (2023)		Realisasi Renja-PD Tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80		65		70		70		100	80		80		1.00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	25	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	11	Dokumen	100	10	Dokumen	10	Dokumen	0.40
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	1	Dokumen	1	Dokumen	0.20

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Renja - PD Tahun (2022)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)		
											Target Renja-PD Tahun (2023)		Realisasi Renja-PD Tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	2	Dokumen	0.40
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	2	Dokumen	0.40
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	2	Dokumen	0.40
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	2	Dokumen	0.40
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	5	Dokumen	100	4	Dokumen	4	Dokumen	0.20

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Renja - PD Tahun (2022)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)		
											Target Renja-PD Tahun (2023)		Realisasi Renja-PD Tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12	Bulan	12	Bulan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	12	Laporan	1.00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	574	Orang/ Bulan	574	Orang/ Bulan	480	Orang/ Bulan	468	Orang/ Bulan	98	468	Orang/ Bulan	468	Orang/ Bulan	0.82
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	1	LAPORAN												0.00
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	1	Laporan	1.00
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Bulan	12	Bulan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	12	Laporan	1.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Renja - PD Tahun (2022)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)		
											Target Renja-PD Tahun (2023)		Realisasi Renja-PD Tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	692	BMD	692	BMD	693	BMD	693	BMD	100	930	BMD	930	BMD	1.34
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Laporan	2	Laporan	200	2	Laporan	2	Laporan	2.00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85	PERSEN	80	Persen	80	Persen	75	Persen	94	85	Persen	85	Persen	1.00
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	67	Stel	57	Stel	5	Stel	5	stel	100	0	Stel	0	Stel	0.00
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4	Orang	0	Orang	4	Orang	3	Orang	75	0	Orang	0	Orang	0.00
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	1	Orang	1	Orang	0	Orang	0	1	Orang	1	Orang	0.50

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Renja - PD Tahun (2022)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)		
											Target Renja-PD Tahun (2023)		Realisasi Renja-PD Tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7	01	02	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	5	Layanan	5	Layanan	5	lembar	5	lembar	100	6	lembar	6	lembar	1.20
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	Jenis	0	Jenis	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	1	Paket	0.20
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15	Unit	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	1	Paket	0.07
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Logistik Kantor yang disediakan	10	Unit	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	1	Paket	0.10
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4500	Lembar	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	1	Paket	0.00
7	01	01	2.06	09	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitas	200	kali	0	kali	0	Unit	0	Unit	#DIV/0!	1	PAKET	1	PAKET	0.01
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	150	kali	150	kali	100	Laporan	100	Laporan	100	100	Laporan	100	Laporan	0.67

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Renja - PD Tahun (2022)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)		
											Target Renja-PD Tahun (2023)		Realisasi Renja-PD Tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500	Lembar	100	Lembar	100	Dokumen	100	Dokumen	100	100	Dokumen	100	Dokumen	0.20
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	1	unit	61	unit	30	unit	30	unit	100	1	unit	1	unit	1.00
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Diadakan	1	Unit	1	Unit	5	Unit	5	Unit	100	0	Unit	0	Unit	0.00
7	01	01	4.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Diadakan	4	Unit			4	Unit	4	Unit	100	0	Unit	0	Unit	0.00
7	01	01	4.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	21	Unit			21	Unit	21	Unit	100	0	Unit	0	Unit	0.00
7	01	01	4.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	5	Unit			5	Unit	5	Unit	100	0	Unit	0	Unit	0.00
7	01	01	4.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Jasa Penunjang Urusan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	12	Bulan	1.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Renja - PD Tahun (2022)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)		
											Target Renja-PD Tahun (2023)		Realisasi Renja-PD Tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
						Pemerintahan Daerah yang disediakan														
7	01	01	4.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	330	Lembar	180	Lembar	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	12	Laporan	0.04
7	01	01	'4.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132	Rekening	132	Rekening	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	12	Laporan	0.09
7	01	01	4.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	12	Bulan	4	Laporan	4	Laporan	100	4	Laporan	4	Laporan	0.33
7	01	01	4.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120	Orang/ Bulan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	12	Laporan	0.10
7	01	01	4.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	24	Unit	24	Unit	32	Unit	32	Unit	100	24	Unit	24	Unit	1.00
7	01	01	4.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang	12	Unit	12	Unit	16	Unit	16	Unit	100	16	Unit	16	Unit	1.33

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Renja - PD Tahun (2022)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)		
											Target Renja-PD Tahun (2023)		Realisasi Renja-PD Tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan														
7	01	01	4.09	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	100	12	Unit	12	Unit	1.00
7	01	01	4.09	03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	1	Unit			5	Unit	5	Unit	100	1	Unit	1	Unit	1.00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	37	Persen	37	Persen	38	Persen	38	Persen	100	39	Persen	39	Persen	1.05
						Tingkat Aksebilitasi Wilayah Kecamatan	86	Persen	86	Persen	87	Persen	87	Persen	100	88	Persen	88	Persen	1.02
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	10	Kegiatan	1	Kegiatan	10	Kegiatan	10	Kegiatan	100	10	Kegiatan	10	Kegiatan	1.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Renja - PD Tahun (2022)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)		
											Target Renja-PD Tahun (2023)		Realisasi Renja-PD Tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14	Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	0	Dokumen	0	Dokumen	0.00
9	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	5	Fasilitasi	5	Fasilitasi	5	Fasilitasi	5	Fasilitasi	100	5	Fasilitasi	5	Fasilitasi	100.00
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	Kegiatan	5	Kegiatan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	1	Laporan	1.00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	2	Kegiatan	2	Kegiatan	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100	2	Kegiatan	2	Kegiatan	1.00
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	5	Kegiatan	12	Kegiatan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	12	Laporan	2.40

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Renja - PD Tahun (2022)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)		
											Target Renja-PD Tahun (2023)		Realisasi Renja-PD Tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	87	Kegiatan	87	Kegiatan	212	Laporan	212	Laporan	100	95	Laporan	95	Laporan	1.09
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang Aktif	100	PERSEN	100	PERSEN	100	PERSEN	100	PERSEN	100	100	PERSEN	100	PERSEN	1.00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	14	kali	14	kali	14	kali	14	kali	100	14	kali	14	kali	1.00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	Orang	150	Orang	7	Lembaga	7	Lembaga	100	7	Lembaga	7	Lembaga	0.07
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	4	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100	3	Laporan	3	Laporan	0.75

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Renja - PD Tahun (2022)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)		
											Target Renja-PD Tahun (2023)		Realisasi Renja-PD Tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	PERSEN	100	PERSEN	100	PERSEN	100	PERSEN	100	100	PERSEN	100	PERSEN	1.00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	14	Kegiatan	14	Kegiatan	14	Kegiatan	14	Kegiatan	100	14	Kegiatan	14	Kegiatan	1.00
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	85	orang			85	orang	85	orang	100	85	orang	85	orang	1.00
7	01	07	05	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Kegiatan	0	Kegiatan	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	1	Dokumen	1.00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja	36	PERSEN	36	PERSEN	50	PERSEN	50	PERSEN	100	60	PERSEN	60	PERSEN	1.67

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Renja - PD Tahun (2022)		Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)		
											Target Renja-PD Tahun (2023)		Realisasi Renja-PD Tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
						Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik														
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	14	Desa	14	Desa	14	Desa	14	Desa	100	14	Desa	14	Desa	1.00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14	Desa	14	Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	1	Dokumen	0.07
7	01	06		11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Kegiatan	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	1	Dokumen	1.00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat program dan kegiatan yang melebihi target, terdapat beberapa program dan kegiatan yang memenuhi target dan beberapa program dan kegiatan yang tidak memenuhi target.

Adapun program dan kegiatan yang tidak memenuhi target disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

1. Perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

2. Nilai pagu pada APBD lebih kecil dari nilai pada Renja.

Hal-hal yang diambil dalam mengatasi hal-hal tersebut adalah:

1. Melakukan pergeseran anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan.

2. Mengurangi dan menghapus beberapa sub kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Sebulu Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara no 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Sebulu. Merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sebulu merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan Srategis Pemerintah.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai kartanegra Nomor 247/SK-BUP/HK/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Camat dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat; Dalam Keputusan tersebut camat melaksanakan 9 Keputusan yang termuat dalam Surat Keputusan tersebut dan pelaksanaannya Kecamatan Sebulu melakukan jenis *PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN serta melaporkan kegiatan setiap bulannya sesuai lampiran Surat Keputusan tersebut.*

Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamata Sebulu cukup memuaskan , terdapat 8 (Delapan) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Sebulu , yaitu :

a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
b. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP;
c. Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan;
d. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang aktif;
e. Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan;
f. Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
g. Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sebulu Dapat dilihat pada Tabel Berikut :

Tabel T – C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sebulu

Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indek Kepuasan Pelayanan Kecamatan			83	84	85	86	87	84.95	90.47	92	93	95	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			70	80	80	80	80	99.3	99.3	80	80	80	
3	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang Dilaksanakan sesuai SOP			38	39	40	41	41	90	94.8	40	41	41	
	Tingkat Aksebilitas Wilayah Kecamatan			87	88	89	90	91	93	94.8	89	90	90	
4	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum yang melibatkan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal, serta tokoh agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Cakupan Penyelenggaraan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

	Urusan Pemerintahan Umum													
7	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dam Fungsi OPD

Berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) adalah memperhatikan isu – isu strategis yang perlu menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan di masa mendatang. Kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak di manfaatkanakan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam jangka panjang.

Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanengara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegra pasal 12 menerangkan bahwa :

- Kecamatan merupakan perangkat daerah dan di bentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atay sebutan lain dan kelurahan.
- Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegra

Pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan Sebulu berpedoman pada Peraturan Bupati nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja perangkat Darah pada Kecamatan Yaitu disebutkan dalam Pasal 3 bahwa Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Adapun mengenai fungsi diuraikan pada pasal berikutnya yaitu di pasal 4 yang berbunyi Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya menyelenggarakan fungsi:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sebulu selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sebulu maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Sebulu 5 (lima) tahun ke depan antara Pemerintahan lain :

1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dan desa dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
5. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Desa dan Kecamatan.
6. Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan dan Desa.
7. Masih lemahnya pembinaan / koordinasi aparatur Desa tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.

8. Perlunya Pengelolaan Data (Pusat Data) Kecamatan Sebulu secara terinci

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Sebulu dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, berdasarkan bidang/seksi di Kecamatan antara lain:

1. Seksi Pemerintahan
   a. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Desa dalam pelayanan kepada masyarakat.
   b. Kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW dan kurangnya kesadaran masyarakat menyiapkan dan memiliki kelengkapan administrasi kependudukan serta dokumen yang harus dimilikai oleh setiap warga yang merupakan produk layanan Pemerintah Kecamatan .
   c. Permasalahan status lahan didesa yang berstatus Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) sehingga menimbulkan konflik antara warga dan pemegang ijin pengekolaan lahan KBK tersebut
2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
   a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum
   b. Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariatif, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban.
   c. Masih Kurangnya sarana prasana dalam melaksanakan tugas.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
   a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa.
   b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
   c. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
   a. Tingkat Pendidikan Masyarakat masih rendah.
   b. Masih tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
   c. Masih tingginya tingkat pengangguran.
   d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan masyarakat Desa
   e. Belum maksimalnya keterlibatan pihak ketiga (perusahaan) dalam membantu kegiatan pemberdayaan dan pembangunan wilayah desa
5. Seksi Pelayanan Umum
   a. Kurangnya Kualitas/ kualifikasi ASN yang masih belum sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi
   b. Masih rendahnya penguasaan tehnologi
   c. Masih Kurangnya sarana Prasarana

Hal-hal yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada para staf kecamatan tentang tugas da fungsi kecamatan serta keahlian yang harus dipelajari dan dimiliki oleh setiap staf
2. Melaporkan kepada pihak diskominfo untuk bias memperbaiki jaringan internet dan menganggarkan wifi kecamatan Sebulu.
3. Melaksanakan jenis kewenangan yang sudah dapat dilaksanakn dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait jenis kewenangna yang belum bisa dilaksanakan.
4. Melakukan pembinaan kepada aparatur desa tentang pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang memang harus dimiliki warga masyarakat.
5. Melibatkan pihak perusahaan dalam kegiatan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan dalam rangka singkronasi rencana kegiatan pemerintah desa yang bisa dibantu dilaksanakan oleh pihak perusahaan.
6. Mengikuti pelatihan untuk menambah wawasan aparatur
7. Menganggarkan sarana prasarana, termaksud pemasangan wifi
8. Melakukan pembinaan kepada Aparatur Desa tetang status lahan KBK dan mengusulkan kepada pihak terkait untuk mengeluarkan sebagian lahan uang menjadi lokasi kegiatan usaha masyarkat yang termaksud dalm lahan KBK agar bisa dimiliki dan diusahakan oleh masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Review terhadap rancangan RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuahan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/ tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan Pada tahun anggaran 2025 review rancangan RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai lampiran/Tabel berikut :

Tabel T – C. 31.

Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kecamatan Sebulu

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)	(12)
	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
1	KECAMATAN				16.861.107.836	KECAMATAN				19.282.912.826	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sebulu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	6.873.455.587	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Sebulu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	8.356.912.826	
1,1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	115.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 Dokumen	605.000.000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
1.1.1	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	300.000.000	Satu Data (BECIK), PUSAT DATA
1.1.2	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu	Kecamatan Sebulu	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	Berita Acara		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu	Kecamatan Sebulu	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	2 Berita Acara	25.000.000	RENSTRA, RENJA

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)	(12)
	Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
1.1.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	140.000.000	RENJA, RENSTRA, RENJA.P
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000	RKA/DPA
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		5.000.000	RKA/DPA
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		
1.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan			

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)	(12)
			Dokumen Perubahan DPA-SKPD					Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
1.1.8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	70.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	70.000.000	Dokumen LKjIP, Dokumen PK, RENJA-P, PK Perubahan, Rancangan Renja, SPIP
1.1.9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	1 Dokumen	60.000.000	Evaluasi RENSTRA dan RENJA, Tambahan Kegiatan SPIP
1,2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12 Bulan	5.340.782.379	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12 Bulan	5.569.239.618	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
1.2.1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sebulu	Jumlah Orang yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	468 Orang/ Bulan	5.245.242.379	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sebulu	Jumlah Orang yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	456 Orang/bulan	5.433.699.618	Gaji dan Tunjangan ASN

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)	(12)
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD	1 Laporan	25.000.000	Dokumen LK
1.2.4	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semester	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semseteran SKPD	12 Laporan	85.540.000	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semester	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semseteran SKPD	12 Laporan	85.540.000	Honor Keuangan
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1,3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	1 Laporan	33.600.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	2 Laporan	258.600.000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)	(12)
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	25.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen PengamananBarang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen PengamananBarang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	150.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
1.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	33.600.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	33.600.000	HONOR BMD
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		30.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		30.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)	(12)
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
1.4.2	Bimbingan teknis inplementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	2 Orang	30.000.000	Bimbingan teknis inplementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	9 Orang	30.000.000	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		233.076.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		233.076.000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
1.5.2	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sebulu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	35.000.000	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sebulu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	35.000.000	
1.5.3	Penyediaan bahan logistik kantor	Kecamatan Sebulu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	22.500.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Kecamatan Sebulu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	22.500.000	
1.5.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket	10.576.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	10.576.000	
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	150 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	150 Laporan	150.000.000	
1.5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	15.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	15.000.000	
1,6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kecamatan Sebulu	Tersedianya Pengadaan Barang pada Perangkat Daerah	1 Unit	237.760.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kecamatan Sebulu	Tersedianya Pengadaan Barang pada Perangkat Daerah	1 Unit	777.760.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)	(12)
	Pemerintah Daerah					Pemerintah Daerah					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
1.6.1	Pengadaan Kendaraa dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	182.760.000	Pengadaan Kendaraa dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	182.760.000	
1.6.1	Pengadaan Mebel	Kecamatan Sebulu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	55.000.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Sebulu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	55.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sebulu	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sebulu	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	540.000.000	
1,7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	40 laporam	704.717.208	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	40 laporam	704.717.208	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
1.7.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.200.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.200.000	
1.7.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	500.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	500.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)	(12)
1.7.3	Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	5.000.000	Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000	
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	197.517.208	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor/Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	197.517.208	
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Layanan	178.520.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sebulu	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Layanan	178.520.000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
1.8.1	Penyediaan jasa pemeliharaan Biaya Pemeliharaan,pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Kendaraan dinas/operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	170.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan Biaya Pemeliharaan,pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Kendaraan dinas/operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	170.000.000	
1.8.2	Pemeliharaan Peralaan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sebulu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dispelihara	10 Unit	8.520.000	Pemeliharaan Peralaan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Sebulu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dispelihara	12 Unit	8.520.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)	(12)
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sebulu	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	9.271.652.249	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sebulu	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	9.925.000.000	
2.1	Kegiatan koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan	Kecamatan Sebulu	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan secara efektif	1 dokumen	15.000.000	Kegiatan koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan	Kecamatan Sebulu	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan secara efektif	1 Dokumen	400.000.000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	150.000.000	Fasiliitasi Kegiatan Erau, Stunting (Rembuk Operasional TPPS Kecamatan)
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	15.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	250.000.000	Kegiatan HUT RI dan Pemerintahan
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintrah Yang	Kecamatan Sebulu	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	1 Laporan	15.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintrah Yang	Kecamatan Sebulu	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	1 Laporan	100.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)	(12)
	Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah					Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
2.2.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	100.000.000	Operasional Pokjanal Posyandu, Pramuka
2.3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Sebulu	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	2 Kegiatan	9.241.652.249	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Sebulu	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	2 Kegiatan	9.425.000.000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
2.3.1	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	25.000.000	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	570.000.000	Fasilitasi Paten, engelolaan dan Penanganan Sampah,

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)	(12)
											Penanganan Darurat Bencana
2.3.2	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64 Laporan	9.216.652.249	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64 Laporan	8.855.000.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sebulu	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang Aktif	100 Persen	250.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sebulu	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang Aktif	100 Persen	586.000.000	
3.1	Kegiatan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kecamatan Sebulu	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	2 Layanan	250.000.000	Kegiatan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kecamatan Sebulu	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	2 Kegiatan	100.000.000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
3.1.1	Peningkatan partisifasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa / Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang	Kecamatan Sebulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000	Peningkatan partisifasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa / Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang	Kecamatan Sebulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	Tambahan Dana dari Kegiatan Pelimpahan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)	(12)
3.1.2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakata di wilayah kecamatan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	225.000.000	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakata di wilayah kecamatan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Lomba Keluraha n dan Desa, Bulan Bakti Gotong Royong
3.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	kecamatan Sebulu	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	2 Layanan	-	Kegiatan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kecamatan Sebulu	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	2 Kegiatan	486.000.000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
3.1.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	486.000.000	Fasilitasi Kegiatan HKG-PKK, Operasional PKK, Forum Anak, Honor Linmas, Jambore Paud
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Sebulu	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	15.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Sebulu	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	175.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)	(12)
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	kecamatan Sebulu	Jumlah Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan Kecamatan	1 Laporan	15.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	kecamatan Sebulu	Jumlah Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan Kecamatan	1 Laporan	175.000.000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
4.1.1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	15.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	175.000.000	Forum kerukunan umat beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sebulu	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	200.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sebulu	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	240.000.000	
4.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	kecamatan Sebulu	Jumlah Urusan Penerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	2 Kegiatan	200.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	kecamatan Sebulu	Jumlah Urusan Penerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	2 Kegiatan	240.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)	(12)
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
4.1.1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Sebulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	85 Orang	195.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Sebulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	85 Orang	240.000.000	Fasilitasi Kegiatan MTQ
4.1.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	5.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	kecamatan Sebulu	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	251.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	kecamatan Sebulu	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	-	
5.1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kecamatan Sebulu	Jumlah Desa Yang difasilitasi	14 Desa	251.000.000	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kecamatan Sebulu	Jumlah Desa Yang difasilitasi	14 Desa	-	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)	(12)
5.1.1	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	50.000.000	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen		
5.1.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	201.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Sebulu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Sebulu merupakan Program Dedikasi Kukar Idaman 2025 dan hasil dari Musrenbang tingkat desa yang merupakan forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah di tingkat dusun. Hasil dari musrenbang desa akan diusulkan di tingkat Kecamatan. Tujuan umum pelaksanaan kegiatan musrenbang desa yaitu mendorong partisipasi masyarakat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan di tingkat desa. Sedangkan tujuan khususnya adalah :

a. Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan yang termasuk urusan pembangunan yang menjadi wewenang Desa yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja OPD Kecamatan.
b. Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh warga Desa yang dibiayai melalui dana swadaya masyarakat dan dikoordinasikan oleh lembaga di Desa setempat.
c. Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan Desa sendiri yang dibiayai melalui dana bantuan dari pemerintah daerah
d. Prioritas kegiatan pembangunan Desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD Kabupaten atau APBD propinsi.
e. Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan yang ada di Desanya di forum musrenbang kecamatan.

Hasil Musrenbang RKP-Desa dari 14 (empat belas) desa di wilayah Kecamatan Sebulu tersebut tertuang dalam SIPD-RI kemudian dimusyawarahkan dalam Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan, untuk selanjutnya hasil dari Musrenbang tersebut diusulkan pada Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten. Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Sebulu Tahun 2025 seperti nampak pada tabel berikut ini :

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	KECAMATAN				
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sebulu	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP		Program Dedikasi Kukar IDAMAN 2025
2.3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Sebulu	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan		
	Sub Kegiatan :				
2.3.2	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan Sebulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	189 Laporan	
1	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Pembangunan Jembatan RT.022 Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manungggal Daya	20	meter	-
2	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Pengurukan Jalan Panda RT.06 Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manungggal Daya	20	meter	-
3	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Penurapan Parit RT.15 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	400	meter	-
4	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Penurapan Parit Jalan Mulawarman RT.15	Desa Sumber Sari	200	meter	-

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara				
5	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Semenisasi Jalan Lapang RT.06 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	600	meter	-
6	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Semenisasi Jalan Bangka Gang Budi RT.10 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	600	meter	-
7	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Semenisasi Gang Intan RT.08 Desa Mekar Jaya Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Mekar Jaya	450	meter	-
8	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Pembuatan Drainase Jalan Pangeran Diponegoro RT.08 Desa Mekar Jaya Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Mekar Jaya	200	meter	-
9	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Semenisasi Jalan Purnama Gang Jembatan RT.09 Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu., Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Ulu	400	meter	-
10	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Semenisasi Gang Barokah RT.10 Desa Sebulu ilir Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Ilir	160	meter	-
11	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Semenisasi Jalan menuju kuburan RT.01 Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Modern	450	meter	-
12	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Pembuatan Parit RT.022 Dusun Sidorejo Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manungggal Daya	200	meter	-

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
13	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Normalisasi Parit RT.15 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	400	meter	-
14	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Pembuatan Parit RT.06 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	200	meter	-
15	Pengadaan Tandon Jalan Purnama Gang Jembatan RT.09 Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu., Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Ulu	1	Paket	-
16	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Pembangunan Saluran Irigasi RT.022 Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manungggal Daya	200	meter	-
17	Pemeliharaan Penerangan Bangunan Pengadaan Lampu Jalan Solar Panel RT.06 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Paket	-
18	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Pemasangan Paving Gang Mak Angel RT.07 Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manungggal Daya	210	Meter	-
19	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Semenisasi Gang Budi RT.022 Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manungggal Daya	300	Meter	-
20	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Sumber Sari, Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Paket	Koordinasikan dgn pihak pengusul terkait Foto,Proposal, Titik Koordinat, Hit Vol sesuai batasan kewenangan PD,skala prioritas pembangunan dan Pagu Anggarannya. Cros Check ke lapangan berdasarkan permasalahan yg ada dan kepemilikan aset
21	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Semenisasi Akses Jalan Menuju SMAN 2 Sumber Sari, Kec Sebulu Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Paket	Koordinasikan dgn pihak pengusul terkait Foto,Proposal, Titik Koordinat, Hit Vol sesuai batasan kewenangan PD,skala prioritas pembangunan dan Pagu Anggarannya. Cros Check

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
					ke lapangan berdasarkan permasalahan yg ada dan kepemilikan asett
22	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Bantuan drainase parit pemukiman Jln. Glatik 2 Dusun Sidodadi Desa Manunggal Daya, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manungggal Daya	1	Paket	Koordinasikan dgn pihak pengusul terkait Foto,Proposal, Titik Koordinat, Hit Vol sesuai batasan kewenangan PD,skala prioritas pembangunan dan Pagu Anggarannya. Cros Check ke lapangan berdasarkan permasalahan yg ada dan kepemilikan aset
23	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Pembangunan Jembatan RT 004 Desa Sanggulan Kec. Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sanggulan	1	Paket	Koordinasikan dgn pihak pengusul terkait Foto,Proposal, Titik Koordinat, Hit Vol sesuai batasan kewenangan PD,skala prioritas pembangunan dan Pagu Anggarannya. Cros Check ke lapangan berdasarkan permasalahan yg ada dan kepemilikan aset
24	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Pengurukan Jalan Hj. Imaniah RT.11 Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Ulu	1000	Meter	-
25	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Pengerasan Agregat Jalan Hj.Imaniah RT.11 Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu , Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Ulu	1000	Meter	-
26	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Pengerasan Agregat Jalan Ahmad Brangka RT.11 Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu , Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Ulu	1000	Meter	-
27	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Bantuan drainase RT 05 dusun siderejo Desa Manunggal Daya, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manungggal Daya	1	Paket	Koordinasikan dgn pihak pengusul terkait Foto,Proposal, Titik Koordinat, Hit Vol sesuai batasan kewenangan PD,skala prioritas pembangunan dan Pagu Anggarannya. Cros Check ke lapangan berdasarkan permasalahan yg ada dan kepemilikan aset
28	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Sebulu Lanjutan	Desa Sebulu Modern	1	Paket	Koordinasikan dgn pihak pengusul terkait Foto,Proposal, Titik Koordinat, Hit Vol sesuai

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	Semenisasi jalan sirbaya menuju batas desa RT. 10 Desa Sebulu Modern, Kab. Kutai Kartanegara				batasan kewenangan PD,skala prioritas pembangunan dan Pagu Anggarannya. Cros Check ke lapangan berdasarkan permasalahan yg ada dan kepemilikan aset
29	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Pengurukan jalan desa-Selerong RT- 10, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Selerong	1	Paket	Koordinasikan dgn pihak pengusul terkait Foto,Proposal, Titik Koordinat, Hit Vol sesuai batasan kewenangan PD,skala prioritas pembangunan dan Pagu Anggarannya. Cros Check ke lapangan berdasarkan permasalahan yg ada dan kepemilikan aset
30	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Semenisasi jembatan tedung RT 02 DESA SENONI, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Senoni	1	Paket	Koordinasikan dgn pihak pengusul terkait Foto,Proposal, Titik Koordinat, Hit Vol sesuai batasan kewenangan PD,skala prioritas pembangunan dan Pagu Anggarannya. Cros Check ke lapangan berdasarkan permasalahan yg ada dan kepemilikan aset
31	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Sebulu Lanjutan turap lahan desa RT 1 desa segihan, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Segihan	1	Paket	Koordinasikan dgn pihak pengusul terkait Foto,Proposal, Titik Koordinat, Hit Vol sesuai batasan kewenangan PD,skala prioritas pembangunan dan Pagu Anggarannya. Cros Check ke lapangan berdasarkan permasalahan yg ada dan kepemilikan aset
32	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Pembangunan drainase lingkungan RT 003 desa segihan, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Segihan	1	Paket	Koordinasikan dgn pihak pengusul terkait Foto,Proposal, Titik Koordinat, Hit Vol sesuai batasan kewenangan PD,skala prioritas pembangunan dan Pagu Anggarannya. Cros Check ke lapangan berdasarkan permasalahan yg ada dan kepemilikan aset
33	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Sebulu Pengadaan panggung semi riging 6 x 8 pak untuk wali nada Borneo prima Desa Sebulu ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Ulu	1	Paket	Koordinasikan dgn pihak pengusul terkait Foto,Proposal, Titik Koordinat, Hit Vol sesuai batasan kewenangan PD,skala prioritas pembangunan dan Pagu Anggarannya. Cros Check ke lapangan berdasarkan permasalahan yg ada dan kepemilikan aset

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
34	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Sebulu Jln. Pribumi Busang RT 015 Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Modern	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul utk melengkapi target capaian terkait Foto, Proposal, Titik Koordinat sbg data pendukung, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya, cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada.
35	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu RT 015. Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Modern	1	Paket	Koordinasikan dgn pihak pengusul terkait Foto,Proposal, Titik Koordinat, Hit Vol sesuai batasan kewenangan PD,skala prioritas pembangunan dan Pagu Anggarannya. Cros Check ke lapangan berdasarkan permasalahan yg ada dan kepemilikan aset
36	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu RT. 003 Desa Sebulu Ilir, Kecamatan Sebulu , Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Ilir	1	Paket	Koordinasikan dgn pihak pengusul terkait Foto,Proposal, Titik Koordinat, Hit Vol sesuai batasan kewenangan PD,skala prioritas pembangunan dan Pagu Anggarannya. Cros Check ke lapangan berdasarkan permasalahan yg ada dan kepemilikan aset
37	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Pembangunan Drainase Jl. P. Diponegoro RT 04, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Mekar Jaya	1	Paket	Koordinasikan dgn pihak pengusul terkait Foto,Proposal, Titik Koordinat, Hit Vol sesuai batasan kewenangan PD,skala prioritas pembangunan dan Pagu Anggarannya. Cros Check ke lapangan berdasarkan permasalahan yg ada dan kepemilikan aset
38	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Pembangunan Drainase Jl. P. Diponegoro RT 07, Desa Mekar Jaya, kecamatan Sebulu,, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Mekar Jaya	1	Paket	Koordinasikan dgn pihak pengusul terkait Foto,Proposal, Titik Koordinat, Hit Vol sesuai batasan kewenangan PD,skala prioritas pembangunan dan Pagu Anggarannya. Cros Check ke lapangan berdasarkan permasalahan yg ada dan kepemilikan aset
39	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Sebulu Lanjutan pembuatan turap jln Sulaiman RT 5 Desa Sanggulan Kec. sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sanggulan	1	Paket	Koordinasikan dgn pihak pengusul terkait Foto,Proposal, Titik Koordinat, Hit Vol sesuai batasan kewenangan PD,skala prioritas pembangunan dan Pagu Anggarannya. Cros Check

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
					ke lapangan berdasarkan permasalahan yg ada dan kepemilikan aset
40	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Semenisasi Jalan Gang Marsudi RT 09 desa sumber sari kec. Sebulu	Desa Sumber Sari	1	Paket	Koordinasikan dgn pihak pengusul terkait Foto,Proposal, Titik Koordinat, Hit Vol sesuai batasan kewenangan PD,skala prioritas pembangunan dan Pagu Anggarannya. Cros Check ke lapangan berdasarkan permasalahan yg ada dan kepemilikan aset
41	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Semenisasi Jalan Baru RT 09 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Paket	Koordinasikan dgn pihak pengusul terkait Foto,Proposal, Titik Koordinat, Hit Vol sesuai batasan kewenangan PD,skala prioritas pembangunan dan Pagu Anggarannya. Cros Check ke lapangan berdasarkan permasalahan yg ada dan kepemilikan aset
42	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Sebulu Gorong-gorong jalan usaha tani Rt 03 dusun wono rejo desa sumber sari, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Paket	Koordinasikan dgn pihak pengusul terkait Foto,Proposal, Titik Koordinat, Hit Vol sesuai batasan kewenangan PD,skala prioritas pembangunan dan Pagu Anggarannya. Cros Check ke lapangan berdasarkan permasalahan yg ada dan kepemilikan aset
43	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Jalan Gang Budi Utomo RT 09 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Unit	Koordinasikan dgn pihak pengusul terkait Foto,Proposal, Titik Koordinat, Hit Vol sesuai batasan kewenangan PD,skala prioritas pembangunan dan Pagu Anggarannya. Cros Check ke lapangan berdasarkan permasalahan yg ada dan kepemilikan aset
44	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Jalan Gang Arda RT 17 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Unit	Koordinasikan dgn pihak pengusul terkait Foto,Proposal, Titik Koordinat, Hit Vol sesuai batasan kewenangan PD,skala prioritas pembangunan dan Pagu Anggarannya. Cros Check ke lapangan berdasarkan permasalahan yg ada dan kepemilikan aset

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
45	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Jalan Blitar RT 03 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Unit	Koordinasikan dgn pihak pengusul terkait Foto,Proposal, Titik Koordinat, Hit Vol sesuai batasan kewenangan PD,skala prioritas pembangunan dan Pagu Anggarannya. Cros Check ke lapangan berdasarkan permasalahan yg ada dan kepemilikan aset
46	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Jalan Pahlawan RT 02 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Unit	Koordinasikan dgn pihak pengusul terkait Foto,Proposal, Titik Koordinat, Hit Vol sesuai batasan kewenangan PD,skala prioritas pembangunan dan Pagu Anggarannya. Cros Check ke lapangan berdasarkan permasalahan yg ada dan kepemilikan aset
47	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Jalan Pelajar RT 09 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Unit	Koordinasikan dgn pihak pengusul terkait Foto,Proposal, Titik Koordinat, Hit Vol sesuai batasan kewenangan PD,skala prioritas pembangunan dan Pagu Anggarannya. Cros Check ke lapangan berdasarkan permasalahan yg ada dan kepemilikan aset
48	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu DESA MEKAR JAYA , Kab. Kutai Kartanegara	Desa Mekar Jaya	1	Paket	Koordinasikan dgn pihak pengusul terkait Foto,Proposal, Titik Koordinat, Hit Vol sesuai batasan kewenangan PD,skala prioritas pembangunan dan Pagu Anggarannya. Cros Check ke lapangan berdasarkan permasalahan yg ada dan kepemilikan aset
49	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manunggal Daya	1	Paket	Koordinasikan dgn pihak pengusul terkait Foto,Proposal, Titik Koordinat, Hit Vol sesuai batasan kewenangan PD,skala prioritas pembangunan dan Pagu Anggarannya. Cros Check ke lapangan berdasarkan permasalahan yg ada dan kepemilikan aset
50	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Jl. Mawar RT 2, Desa Mekar Jaya, kecamatan sebulu,, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Mekar Jaya	1	PAKET	Koordinasikan dgn pihak pengusul terkait Foto,Proposal, Titik Koordinat, Hit Vol sesuai batasan kewenangan PD,skala prioritas pembangunan dan Pagu Anggarannya. Cros Check

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
					ke lapangan berdasarkan permasalahan yg ada dan kepemilikan aset
51	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Jl. Melati RT 3, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sebulu, Kukar., Kab. Kutai Kartanegara	Desa Mekar Jaya	1	PAKET	Koordinasikan dgn pihak pengusul terkait Foto,Proposal, Titik Koordinat, Hit Vol sesuai batasan kewenangan PD,skala prioritas pembangunan dan Pagu Anggarannya. Cros Check ke lapangan berdasarkan permasalahan yg ada dan kepemilikan aset
52	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Rt.01 Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Ulu	1	Paket	Koordinasikan dgn pihak pengusul terkait Foto,Proposal, Titik Koordinat, Hit Vol sesuai batasan kewenangan PD,skala prioritas pembangunan dan Pagu Anggarannya. Cros Check ke lapangan berdasarkan permasalahan yg ada dan kepemilikan aset
53	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Rt.17 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Paket	Koordinasikan dgn pihak pengusul terkait Foto,Proposal, Titik Koordinat, Hit Vol sesuai batasan kewenangan PD,skala prioritas pembangunan dan Pagu Anggarannya. Cros Check ke lapangan berdasarkan permasalahan yg ada dan kepemilikan aset
54	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Rt.017 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Paket	Koordinasikan dgn pihak pengusul terkait Foto,Proposal, Titik Koordinat, Hit Vol sesuai batasan kewenangan PD,skala prioritas pembangunan dan Pagu Anggarannya. Cros Check ke lapangan berdasarkan permasalahan yg ada dan kepemilikan aset
55	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Rt.017 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Paket	Koordinasikan dgn pihak pengusul terkait Foto,Proposal, Titik Koordinat, Hit Vol sesuai batasan kewenangan PD,skala prioritas pembangunan dan Pagu Anggarannya. Cros Check ke lapangan berdasarkan permasalahan yg ada dan kepemilikan aset

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
56	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Sebulu RT.11 Desa Giri Agung, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Giri Agung	1	Paket	PD Kec, koordinasikan dgn pihak pengusul utk melengkapi target capaian terkait Titik Koordinat dan pagu anggaran sbg data pendukung lakukan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada
57	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan Sebulu RT.11 Desa Giri Agung, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Giri Agung	1	Paket	PD Kec, koordinasikan dgn pihak pengusul utk melengkapi target capaian terkait Titik Koordinat sbg data pendukung, Hitung volume sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya, lakukan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada
58	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan Sebulu Dusun Argomulyo Desa Giri Agung, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Giri Agung	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul utk melengkapi target capaian terkait Titik Koordinat sbg data pendukung, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya, cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada.
59	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Sebulu jln. Sulaiman RT 005 Desa Sanggulan, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sanggulan	1	Paket	Kordinasikan ke pengusul, PD Kec dimohon melakukan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset, Pemb Turap batu vol 2x20 m, pagu Rp. 150.000.000,-
60	Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) Jalan Manunggal RT.003 Desa Sebulu Ilir, Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Ilir	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross cheek ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan..
61	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Jln. Sulaiman RT 005 Desa Sanggulan Kec. Sebulu (titik koordinat -0.3254595, 116.8424850), Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sanggulan	1	Paket	Dokumen pendukung Seperti Foto, Proposal, Titik Koordinat dan volume belum lengkap/belum ada
62	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Sebulu Jln. Batuan RT 014 Desa Sanggulan, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sanggulan	1	Paket	Kordinasikan ke pengusul, PD Kec dimohon melakukan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya.

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
63	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Jalan Abdullah RT.015 Desa Sebulu Ilir, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai kartanegara , Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Ilir	1	Paket	Kordinasikan ke pengusul, PD Kec dimohon melakukan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya.
64	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Jalan Manunggal Gang H.Cumin RT. 001 Desa Sebulu Ilir, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai kartanegara , Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Ilir	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross cheek ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume, pagu anggaran Rp.200.000.000
65	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Jalan A.yani RT. 006 Desa Sebulu Ilir,Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai kartanegara (jalan Menuju kantor Desa Sebulu Ilir Baru), Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Ilir	1	Paket	Lengkapi Proposal, Foto, Titik Koordinat sebagai dokumen pendukung..
66	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Jalan. Pemuda RT.003 Desa Sebulu Ilir, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai kartanegara , Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Ilir	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul utk melengkapi target capaian terkait Foto, Proposal, Titik Koordinat, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya, cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset.
67	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Jalan. A.Yani. RT.006 Desa Sebulu Ilir, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai kartanegara , Kab. Kutai Kartanegara	Sebulu Ilir	1	Paket	Lengkapi Proposal, Foto, Titik Koordinat sebagai dokumen pendukung..
68	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih jl poros tenggarong - kota bangun desa senoni dusun rambutan rt 17 kecamatan sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Senoni	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul utk melengkapi target capaian terkait foto, Proposal, Titik Koordinat sbg data pendukung, Hitung volume dan Pagu anggarannya, cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada
69	Pembuatan Tempat Sampah Penampungan Sementara di Kecamatan Sebulu rt 013 dusun rambutan DESA senoni, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Senoni	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul utk melengkapi target capaian terkait foto, Proposal, Titik Koordinat sbg data pendukung, Hitung volume dan Pagu anggarannya, cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
70	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Sebulu jl syukri rt 016 dusun rambutan Desa Senoni, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Senoni	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.
71	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu RT. 001 Dusun Antai, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Moderen	1	Paket	Kordinasikan ke pengusul, PD Kec dimohon melakukan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya
72	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Sebulu RT.4 Desa Giri Agung (Kampung Mandiri), Kab. Kutai Kartanegara	Desa Giri Agung	1	Paket	Kordinasikan ke pengusul, PD Kec dimohon melakukan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya
73	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu RT.3 Desa Giri Agung, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Giri Agung	1	Paket	Kordinasikan ke pengusul, PD Kec dimohon melakukan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya
74	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Sebulu RT.2 Desa Giri Agung, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Giri Agung	1	Paket	Kordinasikan ke pengusul, PD Kec dimohon melakukan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya
75	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Sebulu RT.7 Desa Giri Agung, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Giri Agung	1	Paket	Kordinasikan ke pengusul, PD Kec dimohon melakukan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya
76	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Sebulu RT.6 Desa Giri Agung, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Giri Agung	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul utk melengkapi target capaian terkait Foto, Proposal, Titik Koordinat sbg data pendukung, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
					anggarannya, cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada
77	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Sebulu RT.9 Desa Giri Agung, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Giri Agung	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul utk melengkapi target capaian terkait Foto, Proposal, Titik Koordinat sbg data pendukung, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya, cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada
78	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Semenisasi jalan sabar, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Beloro	1	Paket	Kordinasikan ke pengusul, PD Kec dimohon melakukan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya
79	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Jalan Damai RT. 002 Dusun Antai, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Moderen	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.
80	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu jln syahran R rt.010, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Segihan	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset.
81	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu jl.syahran R Rt.001, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Segihan	1	Paket	Dokumen pendukung Seperti Proposal, Titik Koordinat ,pagu anggaran dan volume belum lengkap/belum ada
82	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Sebulu Jl.H.Acmad Ilok Rt.001, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Segihan	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross cheek ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan
83	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Sebulu Jl.Takmbak Rel Rt.006,Jl.Ulin Rt.009 Dan Jl. Ulin Rt.011, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Segihan	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross cheek ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan
84	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Sebulu	Desa Segihan	1	Paket	Koordinasikan dengan PD Dinas Pekerjaan Umum terkait target lokasi prioritas OPD thn 2025, Lengkapi dokumentasi beserta titik koordinat sbg

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	Jl.Syahran R Rt.001,RT.002,Rt.007 dan Jl.Ulin Rt.0011, Kab. Kutai Kartanegara				data pendukung, Usulan prioritas di teruskan ke PD PU , dengan batas Volume lebar < 5 m, hitung RABnya
85	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Sebulu Jl.H.Ahmad Ilok Rt.001, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Segihan	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross cheek ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan
86	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan Sebulu Jl.Ulin Rt.009,Rt.010 dan Rt.011, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Segihan	1	Paket	Lengkapi Proposal, Foto, Titik Koordinat sebagai dokumen pendukung..
87	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Jl.Syahran R dan Jl. H.Ahmad Ilok, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Segihan	1	Paket	Lengkapi Proposal, Foto, Titik Koordinat sebagai dokumen pendukung
88	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu RT.16 desa Giri Agung, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Giri Agung	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross cheek ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.
89	Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) di Kecamatan Sebulu Jl. Syahran R , Kab. Kutai Kartanegara	Desa Segihan	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross cheek ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan
90	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Jl.Syahran R, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Segihan	1	Paket	Lengkapi Proposal, Foto, Titik Koordinat sebagai dokumen pendukung
91	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Pebangunan Jembatan Loa Senyaung RT 009, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Beloro	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan
92	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Pembangunan Jembatan Loa jahab RT 9 , Kab. Kutai Kartanegara	Desa Beloro	1	Paket	Kordinasikan ke pengusul, PD Kec dimohon melakukan cross cheek ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya.

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
93	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Sebulu Jalan Kacer RT 016 Dusun Sidodadi, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manunggal Daya	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross cheek ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.
94	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Sebulu Gang Barokah RT 012 Dusun Permai, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manunggal Daya	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.
95	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Sebulu Jalan TSM 2 RT 016, Dusun Sidodadi, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manunggal Daya	1	Paket	Kordinasikan ke pengusul, PD Kec dimohon melakukan cross cheek ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya.
96	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Sebulu Jalan Matoa RT 016, Dusun Sidodadi, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manunggal Daya	1	Paket	Kordinasikan ke pengusul, PD Kec dimohon melakukan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya.
97	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Jl gunung angin rt 013, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Senoni	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul utk melengkapi target capaian terkait Proposal, Titik Koordinat, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya, cross cheek ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset.
98	Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) di Kecamatan Sebulu Jl air terjun rt 002 dusun purong kehati, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Senoni	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul utk melengkapi target capaian terkait Foto, Proposal, Titik Koordinat, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya, cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset
99	Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) di Kecamatan Sebulu Jl poros tenggarong-kota bangun km 40 rt017 dusun rambutan, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Senoni	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul utk melengkapi target capaian terkait Proposal, Titik Koordinat, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya, cross cheek ke lapangan

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
					berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset
100	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Jalan Gunung dadeh RT 010 Desa Sebulu Ilir Kecamatan Sebulu , Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Ilir	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.
101	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Jalan Abdullah RT.014 Desa Sebulu Ilir Kecamatan Sebulu , Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Ilir	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross cheek ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.
102	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Jln. Selayar RT.006 Desa Mekar Jaya, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Mekar Jaya	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.
103	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Jln. P. Diponegoro RT.007 Desa Mekar Jaya, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Mekar Jaya	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul utk melengkapi target capaian terkait foto, Proposal, Titik Koordinat sbg data pendukung, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya, cross check ke lapangan dan Dinas Perkim terkait aset.
104	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Jln. Jendral Sudirman RT.003 Desa Mekar Jaya, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Mekar Jaya	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul utk melengkapi target capaian terkait Titik Koordinat, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya, cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset
105	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Sebulu Jl. Budi RT 022, Dusun Sidorejo, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manunggal Daya	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul utk melengkapi target capaian terkait Titik Koordinat, Hitung sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya, cross cheek ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset
106	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Sebulu Jalan Mak Angel RT 007, Dusun Sidorejo, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manunggal Daya	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul utk melengkapi target capaian terkait Titik Koordinat, Hitung sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
					anggarannya, cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset
107	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Sebulu Jl. Enggang RT 017, Dusun Sidorejo, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manunggal Daya	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul utk melengkapi target capaian terkait foto, Proposal, Titik Koordinat sbg data pendukung, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya, cross check ke lapangan dan Dinas Perkim terkait aset.
108	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Sebulu Jl. Kelinci RT 005, Dusun Sidorejo, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manunggal Daya	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul utk melengkapi target capaian terkait Titik Koordinat sbg data pendukung, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya, cross check ke lapangan terkait aset.
109	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Sebulu Jalan Makam RT 006, Dusun Sidorejo, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manunggal Daya	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan
110	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Sebulu Jl. Serindit RT , Dusun Sidodadi, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manunggal Daya	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung v pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan
111	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Dusun Rapak Baru, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manunggal Daya	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan
112	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Sebulu Jl. Elang RT 026, Dusun Panji, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manunggal Daya	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross cheek ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.
113	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Sebulu Jl. Turi RT 014, Dusun Permai, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manunggal Daya	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross cheek ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
114	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Jl. Kelinci RT 005, Dusun Sidorejo, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manunggal Daya	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross cheek ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.
115	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Sebulu Jl. Lidah Buaya RT 015, Dusun Permai, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manunggal Daya	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross cheek ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.
116	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu DAM Pasar RT 016, Dusun Sidodadi, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manunggal Daya	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. .
117	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu RT.002, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Selerong	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross cheek ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan
118	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu RT 010, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Selerong	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul utk melengkapi target capaian terkait foto, Proposal, Titik Koordinat sbg data pendukung, Hitung volume dan Pagu anggarannya, cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada.
119	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu RT 009, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Selerong	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul utk melengkapi target capaian terkait foto, Proposal, Titik Koordinat sbg data pendukung, Hitung volume dan Pagu anggarannya, cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada.
120	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu RT 010 (PERBATASAN SELERONG-SENONI), Kab. Kutai Kartanegara	Desa Selerong	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul utk melengkapi target capaian terkait foto, Proposal, Titik Koordinat sbg data pendukung, Hitung volume dan Pagu anggarannya, cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada.
121	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Sebulu KM. 3 (AIR TERJUN), Kab. Kutai Kartanegara	Desa Selerong	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
					ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan
122	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan Sebulu RT. 011 (km.40), Kab. Kutai Kartanegara	Desa Selerong	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.
123	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Sebulu RT. 009 (BELAKANG MTs BAITURRAHMAN), Kab. Kutai Kartanegara	Desa Selerong	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.
124	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Sebulu RT. 009, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Selerong	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.
125	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Sebulu RT.009 (PUSBAN), Kab. Kutai Kartanegara	Desa Selerong	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.
126	Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) di Kecamatan Sebulu Jalan abdullah RT.008 Desa Sebulu Ilir Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Ilir	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.
127	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Sebulu Gang Barokah RT 012, Dusun Permai, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manunggal Daya	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.
128	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Sebulu Jalan Enjel RT 007, Dusun Sidorejo, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manunggal Daya	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.
129	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Sebulu Jl. Kelinci RT 005, Dusun Sidorejo, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manunggal Daya	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross cheek ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
130	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Jl. Lidah Buaya RT 015, Dusun Permai, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manunggal Daya	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross cheek ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.
131	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu DAM Pasar RT 016, Dusun Sidodadi, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manunggal Daya	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross cheek ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.
132	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Sebulu Jalan Kelompok Tani Sinar Anugerah Desa Lekaq Kidau Kec.Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Lekaq Kidau	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross cheek ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.
133	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Jl. H. Edison, RT 11 Desa Sebulu Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Ulu	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross cheek ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.
134	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Sebulu Jl. H.M. Arsyad , Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Ulu	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross cheek ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.
135	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Jalan Gang Imansyah, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Ulu	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross cheek ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.
136	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Sebulu RT. 004, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Selerong	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.
137	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Jalan Kartini RT 03 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross cheek ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
138	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross cheek ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.
139	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Jalan Makmur RT 20 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan
140	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Jalan Sidodadi RT 21 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan
141	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Jalan Srinodo, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan
142	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu RT 002 Dusun Panji, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manunggal Daya	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan
143	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Gunung Malang RT 017, Dusun Sidorejo, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manunggal Daya	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan
144	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Sebulu RT 016 Dusun Sidodadi, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manunggal Daya	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan
145	Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) di Kecamatan Sebulu RT 019 Dusun Panji, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manunggal Daya	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross cheek ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
146	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Sebulu Jl. Arabia 3 RT 018, Dusun Permai, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manunggal Daya	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.
147	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Jalan Alsebar Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan
148	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu RT 018, Dusun Permai, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Manunggal Daya	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan
149	Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) jalan Abdullah rt 008 desa sebulu Ilir Kecamatan Sebulu , Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Ilir	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan
150	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Jalan Mahanggi RT 17 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan
151	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Jalan Pahlawan RT 03 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan
152	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Jalan panca karya rt 010 Desa sebulu ilir Kecamatan Sebulu , Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Ilir	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan
153	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Jalan KH. Dewantara rt 007 Desa Sebulu Ilir Kecamatan Sebulu , Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Ilir	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan
154	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Jalan Pemuda	Desa Sebulu Ilir	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	RT. 006 Desa Sebulu Ilir Kecamatan Sebulu , Kab. Kutai Kartanegara				ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan
155	Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) jalan manunggal RT 003 desa Sebulu Ilir Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Ilir	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.
156	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Jalan Gang Buntu RT 09 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.
157	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Jalan masudi RT 09 Desa Sari kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.
158	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Jalan A.Yani rt 006 Desa sebulu Ilir Kecamatan Sebulu , Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Ilir	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul dan cross cheek ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset. Hitung volume dan pagu anggaran sesuai batasan kewenangan kecamatan.
159	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana jalan Pemuda rt 007 desa sebulu ilir Kecamatan Sebulu , Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Ilir	1	Paket	Permasalahan tidak ada dalam kamus usulan
160	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Jln Syahran.r, Kab. Kutai Kartanegara Kecamatan Sebulu	Desa Segihan	1	Paket	Kordinasikan ke pengusul, PD Kec dimohon melakukan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya
161	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Sebulu JALAN A.YANI RT 006 DESA SEBULU ILIR, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Ilir	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul utk melengkapi target capaian terkait Foto, Proposal, Titik Koordinat, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya, cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
162	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Desa Tanjung Harapan RT 01 ke Desa Beloro, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Tanjung Harapan	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul utk melengkapi target capaian terkait Foto, Proposal, Titik Koordinat, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya, cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset.
163	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Desa Tanjung Harapan RT. 03 ke Dusun Jambe Desa Sanggulan, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Tanjung Harapan	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul utk melengkapi target capaian terkait Foto, Titik Koordinat, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya, cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset
164	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Desa Tanjung Harapan RT. 01 , Kab. Kutai Kartanegara	Desa Tanjung Harapan	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul utk melengkapi target capaian terkait Foto, Proposal, Titik Koordinat, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya, cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset.
165	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan Sebulu Desa Tanjung Harapan RT. 01, 02 dan 03, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Tanjung Harapan	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul utk melengkapi target capaian terkait Foto, Proposal, Titik Koordinat, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya, cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset
166	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Sebulu Desa Tanjung Harapan RT. 05, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Tanjung Harapan	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul utk melengkapi target capaian terkait Foto, Proposal, Titik Koordinat, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya, cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset.
167	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Desa Tanjung Harapan RT. 06, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Tanjung Harapan	1	Paket	Koordinasikan dengan PD Dinas Pekerjaan Umum terkait target lokasi prioritas OPD thn 2025, Lengkapi dokumentasi beserta titik koordinat sbg data pendukung, Usulan prioritas di teruskan ke PD

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
					PU , dengan batas Volume lebar < 5 m, hitung RABnya
168	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Sebulu Desa Tanjung Harapan RT. 07, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Tanjung Harapan	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul utk melengkapi target capaian terkait Foto, Proposal, Titik Koordinat, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya, cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset
169	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Desa Tanjung Harapan RT. 007, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Tanjung Harapan	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul utk melengkapi target capaian terkait Foto, Proposal, Titik Koordinat, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya, cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset.
170	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Desa Tanjung Harapan RT. 08, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Tanjung Harapan	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul utk melengkapi target capaian terkait Foto, Proposal, Titik Koordinat, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya, cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset.
171	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Desa Tanjung Harapan RT. 07, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Tanjung Harapan	1	Paket	PD Kec, koordinasi dgn pihak pengusul utk melengkapi target capaian terkait Foto, Proposal, Titik Koordinat, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya, cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset.
172	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan Sebulu JALAN A.YANI RT.006 DESA SEBULU ILIR, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Ilir	1	Paket	Usulan diteruskan ke Dinas Perkim.Perlu dikoordinasikan dengan OPD pengampu terkait target lokasi prioritas OPD thn 2025, Hitung Ulang Volume dan RAB pada proposal
173	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu RT 009 SEBULU ILIR, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Ilir	1	Paket	Kordinasikan ke pengusul, PD Kec dimohon melakukan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset,

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
					Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya
174	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Jalan Baru RT 09 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Paket	Kordinasikan ke pengusul, PD Kec dimohon melakukan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya
175	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Gang Budi Utomo RT 09 , Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Paket	Kordinasikan ke pengusul, PD Kec dimohon melakukan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya
176	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Jalan Arda RT 17 Desa Sumber Sari , Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Paket	Kordinasikan ke pengusul, PD Kec dimohon melakukan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya
177	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Jalan Kebangkitan RT 09 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Paket	Kordinasikan ke pengusul, PD Kec dimohon melakukan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya
178	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan Sebulu DESA SEBULU ILIR, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Ilir	1	Paket	Kordinasikan ke pengusul, PD Kec dimohon melakukan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya
179	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Sebulu DESA SEBULU ILIR, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sebulu Ilir	1	Paket	Kordinasikan ke pengusul, PD Kec dimohon melakukan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya
180	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Jalan Belitung RT	Desa Sumber Sari	1	Paket	Kordinasikan ke pengusul, PD Kec dimohon melakukan cross check ke lapangan berdasarkan

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	11 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara				permasalahan yang ada dan kepemilikan aset, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya
181	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Jalan Batavia RT 12 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Paket	Kordinasikan ke pengusul, PD Kec dimohon melakukan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya
182	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Jalan Lingkungan RT 09 Sumber Sari, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Paket	Kordinasikan ke pengusul, PD Kec dimohon melakukan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya
183	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Jalan Sabang RT 09 Desa Sumber Sari , Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Paket	Kordinasikan ke pengusul, PD Kec dimohon melakukan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya
184	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Jalan Pelajar RT 11 Desa Sumber Sari , Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Paket	Kordinasikan ke pengusul, PD Kec dimohon melakukan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya
185	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Jalan Komodo RT 09 Desa Sumber Sari, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Paket	Kordinasikan ke pengusul, PD Kec dimohon melakukan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya
186	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Jalan Pahlawan RT 02 Desa Sumber Sari , Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Paket	Kordinasikan ke pengusul, PD Kec dimohon melakukan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
187	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Jalan Kalimantan RT 04 Desa Sumber Sari, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Paket	Kordinasikan ke pengusul, PD Kec dimohon melakukan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya
188	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Jalan Damai RT 20 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Sumber Sari	1	Paket	Kordinasikan ke pengusul, PD Kec dimohon melakukan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya.
189	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Sebulu Jln.syahran.r RT001, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Segihan	1	Paket	Kordinasikan ke pengusul, PD Kec dimohon melakukan cross check ke lapangan berdasarkan permasalahan yang ada dan kepemilikan aset, Hitung vol. sesuai batasan kewenangan kec dan Pagu anggarannya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Upaya pembangunan yang dilakukan di daerah adalah merupakan bagian integral dari upaya pembangunan nasional. Sehingga ketika daerah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus selaras dengan RPJP Daerah (Perda Kab Kukar No. 17 Tahun 2010), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi (Perda Propinsi No. 15 Tahun 2008) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010).

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara memperhatikan 6 (enam) Prioritas, Fokus dan Sasaran Daerah tahun 2025 adalah :

PRIORITAS KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA	FOKUS PEMBANGUNAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET RKPD 2025	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
1 Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Penataan manajemen keuangan dan aset daerah	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Persepsi Anti Korupsi	8.50	4	11	51
	2 Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu berbasis IT	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	9.85	9	15	48
2 Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	3 Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	51.50	9	12	36
			Indeks Pendidikan	0.704			
	4 Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan dan Pendidikan yang bermutu	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0.821	5	15	103
3 Percepatan pembangun	5 Penguatan kecamatan	Meningkatnya pemerataan	Indeks Desa Membangun	0.80	4	4	11

PRIORITAS KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA		FOKUS PEMBANGUNAN		SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET RKPD 2025	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
	an desa dan kawasan perdesaan		pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis daerah	pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat					
4	Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja	6	Pengembangan kewirausahaan dan manajemen bisnis bagi kaum muda	Menurunnya pengangguran di masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.45	2	4	13
					PDRB PerKapita	381.63			
5	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	7	Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam, sosial budaya, dan olah raga yang berkelanjutan	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	4.00	3	6	17
		8	Peningkatan produktivitas industri kreatif	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	7.48	2	4	10
6	Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN	9	Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Indeks Aksesibilitas Wilayah	87.18	2	3	20

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional. RPJMD Tahun adalah tahapan kedua dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun , yaitu "*Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Bahagia*". Penyusunan RPJMD ini mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan evaluasi Pembangunan selama lima tahun sebelumnya, pembangunan yang dilaksanakan telah memberikan dampak baik positif maupun negative bagi kehidupan masyarakat.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan Birokrasi yang bersih, Efektif, dan Melayanai
2. Meningkatkan Sumber daya Manusia yang berakhlak Mulia, unggul dan berbudaya
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah.
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan

3.2 Tujuan dan sasaran Renja-PD

Dalam rangka mewujudkaan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kecamatan Sebulu Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan yang Efektif Efisien Inovatif Transparan dan Akuntabel	Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor Yang menjadi bahan pertimbangan rumusan program dan kegiatan

Rencana Kerja Akhir Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis (Renstra) tahun 2021 – 2026 Kantor Camat Sebulu yang berpedoman pada Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Keterkaitan antara Visi Misi Bupati dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

VISI	MENUJU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN	
NO	MISI BUPATI KUTAI KARTANEGARA	TUPOKSI KECAMATAN
1	Misi ke 1 Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif Efisien dan Melayani	TUGAS ❖ Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Kecamatan ❖ Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum. ❖ Mengkoordinasikan nyelenggaraan kegiatan pemerintahn yang dilakukan oleh perangkat di Tingkat Kecamatan ❖ Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan ❖ Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten FUNGSI ❖ Menyusun kebijakan teknis operasional Kecamatan ❖ Melaksanakan pelayanan Publik ❖ Menyusun laporan secara periodic kepada Bupat
2	Misi ke 2 Memperkuat pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	TUGAS ❖ Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat FUNGSI ❖ Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
4	Misi ke 4 Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah	TUGAS ❖ Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan /atau kelurahan FUNGSI ❖ Menyelenggarakan pembinaan Wilayah

		❖ Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan

b. Adapun Pagu Indikatif Rancangan Akhir Renja tahun 2025 sesuai RPJMD sebesar Rp. 19.282.912.826,00 di danai APBD Kabupaten Kutai Kartanega, yang terdiri dari 5 (lima) Program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 40 (empat tpuluh) Sub Kegiatan

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan :
1.1.1	Pelaksanaan Pengumulan Data Statistik Sektoral Daerah
1.1.2	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.1.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan :
1.2.1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester
1.2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan :
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
1.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
1.3.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
1.3.4	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan :
1.4.1	Bimbingan teknis inplementasi Peraturan Perundang-undangan
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan :
1.5.1	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.5.2	Penyediaan bahan logistik kantor
1.5.3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.5.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.5.5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Sub Kegiatan :
1.6.1	Pengadaan Kendaraa dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.6.2	Pengadaan Mebel
1.6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Sub Kegiatan :
1.7.1	Penyediaan jasa surat menyurat
1.7.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.7.3	Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Sub Kegiatan :
1.8.1	Penyediaan jasa pemeliharaan Biaya Pemeliharaan,pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan
1.8.2	Pemeliharaan Peralaan dan Mesin Lainnya
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
2.1	Kegiatan koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan
	Sub Kegiatan :
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintrah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan :
2.2.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
2.3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
	Sub Kegiatan :
2.3.1	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan
2.3.2	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
3.1	Kegiatan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Sub Kegiatan :
3.1.1	Peningkatan partisifasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa / Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang
3.1.2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakata di wilayah kecamatan
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
	Sub Kegiatan :
3.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
4.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Sub Kegiatan :
4.1.1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
	Sub Kegiatan :

5.1.1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

c. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Sebulu Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra), Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat.

d. Tabel Rumusan rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 sebagaimana dalam tabel berikut

TABEL T.C – 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KECAMATAN SEBULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nama OPD : KECAMATAN SEBULU

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif
1	(2)	(4)	(8)	(10)	(11)		(12)	(5)	(6)
	UNSUR KEWILAYAHAN								
7	KECAMATAN				19.282.912.826				16.861.112.426
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	80	8.356.912.826	APBD		80	6.765.890.000
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Sebulu	9 Dokumen	605.000.000	APBD		10 Dokumen	138.000.000
	Sub Kegiatan :								
7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	2 Data	300.000.000	APBD			
7.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	2 Berita Acara	25.000.000	APBD			
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	2 Dokumen	140.000.000	APBD		2 Dokumen	50.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif
1	(2)	(4)	(8)	(10)	(11)		(12)	(5)	(6)
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	5.000.000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	5.000.000
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Sebulu	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	5.000.000
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Sebulu	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	5.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Sebulu	6 Dokumen	70.000.000	APBD		4 laporan	68.000.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	2 Laporan	60.000.000	APBD			
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Kecamatan Sebulu	12 Bulan	5.569.239.618	APBD		12 Bulan	5.352.622.588
	Sub Kegiatan :								
7.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Kecamatan Sebulu	456 Orang/ Bulan	5.433.699.618	APBD		492 Orang/ Bulan	5.266.243.188

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif
1	(2)	(4)	(8)	(10)	(11)		(12)	(5)	(6)
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD	Kecamatan Sebulu	1 Laporan	25.000.000	APBD		1 Dokumen	10.839.400
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semseteran SKPD	Kecamatan Sebulu	12 Laporan	85.540.000	APBD		12 Laporan	75.540.000
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	25.000.000	APBD			
7.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Kecamatan Sebulu	2 Laporan	258.600.000	APBD		1 Laporan	33.600.000
	Sub Kegiatan :								
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Sebulu	2 Rencana	25.000.000	APBD			
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	150.000.000	APBD			
7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Sebulu	1 Lapoaran	50.000.000	APBD			
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	Kecamatan Sebulu	2 Laporan	33.600.000	APBD		1 Laporan	33.600.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif
1	(2)	(4)	(8)	(10)	(11)		(12)	(5)	(6)
		Daerah pada SKPD							
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu		30.000.000	APBD			68.500.000
	Sub Kegiatan :								
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Sebulu			APBD		48 Orang	61.500.000
7.01.01.2.05.11	Bimbingan teknis inplementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kecamatan Sebulu	2 Orang	30.000.000	APBD		2 Orang	7.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu		233.076.000	APBD			173.076.000
	Sub Kegiatan :								
7.01.01.2.06.02	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kecamatan Sebulu	1 Paket	35.000.000	APBD		1 Paket	25.000.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kecamatan Sebulu	1 Paket	22.500.000	APBD		1 Paket	22.500.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kecamatan Sebulu	1 Paket	10.576.000	APBD		3 Paket	10.576.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Sebulu	100 Laporan	150.000.000	APBD		150 Laporan	100.000.000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Sebulu	100 Dokumen	15.000.000	APBD		500 Dokumen	15.000.000
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang pada Perangkat Daerah	Kecamatan Sebulu	1 Unit	777.760.000	APBD		1 Unit	182.760.000
	Sub Kegiatan :								

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif
1	(2)	(4)	(8)	(10)	(11)		(12)	(5)	(6)
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraa dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kecamatan Sebulu		182.760.000	APBD		1 Unit	182.760.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Diadakan	Kecamatan Sebulu		55.000.000	APBD			
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Mebel Yang Diadakan	Kecamatan Sebulu		540.000.000	APBD			
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kecamatan Sebulu		704.717.208	APBD			638.811.412
	Sub Kegiatan :								
7.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Sebulu	12 Laporan	2.200.000	APBD		12 Laporan	2.200.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Sebulu	12 Laporan	500.000.000	APBD		12 Laporan	449.094.204
7.01.01.2.08.03	Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Sebulu	4 Laporan	5.000.000	APBD		4 Laporan	5.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Sebulu	12 Laporan	197.517.208	APBD		12 Laporan	182.517.208
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sebulu	2 Layanan	178.520.000	APBD		2 Layanan	178.520.000
	Sub Kegiatan :								
7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan Biaya Pemeliharaan,pajak dan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Sebulu	16 unit	170.000.000	APBD		16 unit	170.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif
1	(2)	(4)	(8)	(10)	(11)		(12)	(5)	(6)
	Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan								
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralaan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Sebulu	12 Unit	8.520.000	APBD		10 Unit	8.520.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Kecamatan Sebulu	41 91	9.925.000.000	APBD		41 91	9.612.080.000
7.01.02.2.01	Kegiatan koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan secara efektif	Kecamatan Sebulu	1	400.000.000	APBD		1	15.000.000
	Sub Kegiatan :								
7.01.02,2.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	150.000.000	APBD		1 Dokumen	
7.01.02,2.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	250.000.000	APBD		1 Dokumen	15.000.000
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintrah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Kecamatan Sebulu	1	100.000.000	APBD		1	15.000.000
	Sub Kegiatan :								
7.01.02.2,02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sebulu	1 Laporan		APBD		1 Laporan	15.000.000
7.01.02.2,02.03	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sebulu	1 Laporan	100.000.000	APBD		1 Laporan	15.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif
1	(2)	(4)	(8)	(10)	(11)		(12)	(5)	(6)
7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	Kecamatan Sebulu	2 Kegiatan	9.425.000.000	APBD		2 Kegiatan	9.582.080.000
	Sub Kegiatan :								
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinanpada Urusan Pemerintahan	Kecamatan Sebulu	12 Laporan	570.000.000	APBD		12 Laporan	25.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Sebulu	46 Laporan	8.855.000.000	APBD		46 Laporan	9.557.080.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang Aktif	Kecamatan Sebulu	100 Persen	586.000.000	APBD		100 Persen	243.142.426
7.01.03,2.01	Kegiatan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	kecamatan Sebulu	2 Layanan	100.000.000	APBD		2 Layanan	243.142.426
	Sub Kegiatan :								
7.01.03,2.01.01	Peningkatan partisifasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa / Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Sebulu	7 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	APBD		7 Lembaga Kemasyarakatan	18.142.426
7.01.03,2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakata di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sebulu	5 Laporan	50.000.000	APBD		5 Laporan	225.000.000
7.01.03,2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	kecamatan Sebulu	2 Layanan	486.000.000	APBD		2 Layanan	18.142.426
	Sub Kegiatan :								

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif
1	(2)	(4)	(8)	(10)	(11)		(12)	(5)	(6)
7.01.03,2.01.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Sebulu	3 Lembaga Kemasyarakatan	486.000.000	APBD		7 Lembaga Kemasyarakatan	18.142.426
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Sebulu	100 Persen	175.000.000	APBD			-
7.01.04.2,01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan Kecamatan	kecamatan Sebulu	1 Laporan	175.000.000	APBD			-
	Sub Kegiatan :								
7.01.04.2,01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Sebulu	1 Laporan	175.000.000	APBD			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Sebulu	100 Persen	240.000.000	APBD		100 Persen	200.000.000
7.01.05.2,01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Penerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	kecamatan Sebulu		240.000.000	APBD			200.000.000
	Sub Kegiatan :								
7.01.05.2,01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Sebulu	85 Orang	240.000.000	APBD		85 Orang	195.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indukatif
1	(2)	(4)	(8)	(10)	(11)		(12)	(5)	(6)
7.01.05.2,01.05	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Sebulu	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	5.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	kecamatan Sebulu	80 Persen	-	APBD		80 Persen	40.000.000
7.01.06.2,01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	kecamatan Sebulu		-	APBD			40.000.000
	Sub Kegiatan :								
7.01.06.2,01.03	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Sebulu	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	25.000.000
7.01.06.2,01.011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Sebulu	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	15.000.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Akhir Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana strategis Kecamatan Sebulu Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun. Rencana Kerja Akhir ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan Program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sebulu.

Rencana Kerja Akhir Kecamatan Sebulu Tahun 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2025. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Sebulu.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Akhir Kecamatan Sebulu ini juga masih terdapat kekurang-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Kecamatan Sebulu Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

tt.RENJA KECAMATAN MUARA BADAK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Awala (RAnwal) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2O17 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja pemerintah Daerah).
Tahun 2020 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak sehingga kondisi RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah akan disusun bersamaan dengan penyusunan RKPD 2024 yang berpedoman RPJPD 2021-2026 dengan mempertimbangkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. Rencana Kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka penyusun Rancangan Rencana Perangkat Daerah (RENJA- PD) Tahun 2025 dengan mengacu kepada pedoman sebagai berikut :

1. Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2025.
2. Pedoman Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
3. Pedoman Penyusunan Rancangan Renja-PD Tahun 2025

Dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2025, Perangkat Daerah harus memperhatikan dan mempertimbangkan antara lain :

1. Memastikan sinkronisasi substansi dan proses dengan penyusunan RKPD 2025;
2. Memperhatikan kategori penyusunan RKPD Tahun 2025, menyesuaikan proses dan substansinya, serta mengaplikasikannya pada sipd.kemendagri.go.id.
3. Hasil pengendalian dan evaluasi RENJA-PD tahun 2021-2026 dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Sektoral;
4. Memastikan data yang digunakan memenuhi kriteria standar data yang baik;
5. Penyesuaian dan penajaman substansi indicator hasil (outcome) berdasarkan hasil pemutahiran cascading.
6. Memperhatikan berbagai regulasi terbaru antara lain : PP 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM); PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.1.1. Pengertian Renja

Rancangan Awa Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan .

Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Muara Badak Tahun 2025 merupakan

dokumen yang berisikan usulan program kerja berikut perkiraan kebutuhan yang akan dilaksanakan pada tahun ke lima RPJMD 2021 – 2026. Dokumen ini disusun mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Badak Tahun 2021– 2026 yang telah disusun dengan mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026.

Sesuai dengan Visi RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 “MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU, MANDIRI, DAN SEJAHTERA “

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang berisikan penjabaran Renstra merupakan salah satu bahan dari Perangkat Daerah yang akan digunakan untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

Selain dari itu,penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tamban Tahun 2025 dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi di tahun pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja). Dalam proses penyusunannya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Badak Tahun 2025 telah mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan dan sinergisitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Hal ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu dan saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel

dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

1.2 Landasan hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah

Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9 Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10 Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

14 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

15 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

16 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Muara Badak Tahun 2025;
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Muara Badak Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

1. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan kecamatan Muara Badak tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Muara Badak dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara.

16.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak tahun 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja-PD dan Capaian Renstra-PD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Program dan Kegiatan
BAB V : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN MUARA BADAK TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan : Tidak ada program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan.

b) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan :
   1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayan Publik
   3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

c) Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan: Tidak ada program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncakanan Dari uraian di atas diketahui sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dari 5 (Lima) Program / kegiatan yang keluarannya mencapai rata-rata 96.%.

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2023 dengan Anggaran sebesar Rp.57.896.066.526,- (sesuai DPPA Tahun 2023) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp51.266.140.037- dan Belanja Modal sebesar Rp3.359.245.000,- dengan tersusun dalam 6 program , diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Muara Badak sebagai berikut :

1. Keterbatasan data dan informasi;
2. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia;
3. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
4. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Kecamatan Muara Badak menyadari bahwa masih ada kelemahan/ kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

d) Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

e) Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut dalam melakukan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil sebagai berikut :

- Melakukan Monitoring, Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan yang dianggap kurang optimal pelaksanaannya.

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan dengan hasil evaluasi bahwa dari kegiatan pelaksanaan anggaran yang dirasakan masih adanya keterlambatan realisasi

pertanggungjawaban keuangan, namun dalam pelaksanaan kegiatan relativ sesuai jadwal yang ditentukan pada tahun bersangkutan.

- Menganalisa data dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan, belum memadainya kualitas sumber daya manuasia. Dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan masih sedikit SDM yang memadai untuk mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan secara lebih baik. Permasalahan lain yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, masih adanya program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Selain itu anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program- program/kegiatan-kegiatan dalam mencapai sasaran tidak memadai, sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusikan dengan baik dan terarah.
- Mengambil kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2024 (tahun berjalan) Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara akan disajikan pada tabel T-C.29 berikut di bawah ini :

TC.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN)

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA PD : KECAMATAN MUARA BADAK

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)				Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2024	
										Target Renja-PD tahun 2023		Realisasi Renja-PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	38,324,916,589		4,599,041,122		6,466,282,159		1,119,967,578	17.32		6,674,403,148	16,574,340,500	43.25
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32	1,071,735,005	6	199,346,000	6	224,790,000	6	211,489,000	94	7	185,000,000	595,835,000	55.60
				Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	6	239,280,000	1	25,125,000	1	25,000,000	1	25,000,000	100.00	2	40,000,000	90,125,000	37.67

				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA	5	55,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	100.00	1	15,000,000	45,000,000	81.82
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	5	55,000,000	1	39,888,000	1	40,000,000	1	39,888,000	99.72	1	20,000,000	99,776,000	181.41
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	5	47,600,000	1	9,520,000	1	9,520,000	1	9,520,000	100.00	1	10,000,000	29,040,000	61.01
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	51,350,000	1	35,135,000	1	35,270,000	1	35,135,000	99.62	1	20,000,000	90,270,000	175.79
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	623,505,005	1	74,678,000	1	100,000,000	1	86,946,000	86.95	1	80,000,000	241,624,000	38.75
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15	23,563,368,277	3	2,231,918,360	3	3,413,693,001	3	2,978,171,975	87.24	1	4,280,442,575	9,490,532,910	40.28
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	325	22,692,058,877	25	2,143,169,460	25	3,285,188,101	25	2,849,667,075	86.74	26	4,130,217,675	9,123,054,210	40.20
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	171,109,400	1	20,234,900	1	25,184,900	1	25,184,900	100.00	1	25,184,900	70,604,700	41.26
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	6	700,200,000	1	68,514,000	1	103,320,000	1	103,320,000	100.00	1	125,040,000	296,874,000	42.40
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11	409,840,000	1	20,400,000	1	65,761,100	2	65,665,000	99.85	2	75,800,000	161,865,000	39.49

					yang direkonsiliasi													
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	165,040,000	0	0	1	24961100.00	1	24,865,000	99.62	1	35,000,000	59,865,000	36.27
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	6	244,800,000	1	20,400,000	1	40,800,000	1	40,800,000	100.00	25/org	40,800,000	61,200,000	25.00
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	125	245,000,000	25	74,999,209	25	29,092,500	25	23,802,500	81.82	25	89,092,792	187,894,501	76.69
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	25	60,000,000	0	0	0	0	25	0	#DIV/0!	0	0	0	0.00
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	125	185,000,000	0	0	25	29,092,500	0	23,802,500	81.82	25 Orang	89,092,792	112,895,292	61.02
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah laporan administrasi Kepegawaian	1	56,700,000	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			0	0.00
				Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	74,999,209	25	74,999,209	0	0			#DIV/0!	0	0	574,879,209	766.51
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi	100	3,340,819,565.00	100	291,232,510.00	100	479,804,808.00	100	499,880,000.00	104.18		545,579,849.00	1,336,692,359	40.01

					umum perangkat daerah													
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36	71,607,300.00	6	2,576,000	6	10,000,000	1	10,000,000	100.00	6	5,000,000	7,576,000	10.58
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150	216,961,000.00	30	31,829,500	30	20,000,000	1	25,000,000	125.00	30	55,000,000	86,829,500	40.02
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	579,959,745.00	2	67,073,000	1	97,289,000	1	120,000,000	123.34	3	99,707,349	166,780,349	28.76
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	143,734,900.00	2	7,316,800	2	30,000,000	1	25,000,000	83.33	4	10,000,000	17,316,800	12.05
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	355,000,000.00	0	-	0	32,469,000	1	25,000,000	77.00	1	50,000,000	50,000,000	14.08
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	5	1,534,470,000.00	1	173,562,210	1	224,728,000	1	244,880,000	108.97	1	244,880,000	418,442,210	27.27
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000	419,086,620.00	200	8,875,000	200	65,318,808	1	50,000,000	76.55	1	50,000,000	58,875,000	14.05
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	1	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30,992,500	30,992,500	154.96

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	37	1,931,740,920		691,718,000		1,123,130,970		444,962,000	39.62	-	200,000,000	1,336,680,000	69.20
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20	251,740,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
				Pengadaan Mebel	jumlah pengadaan mebel	11	40,800,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap lainnya	2	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya	1	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	1	200,000,000	200,000,000	100.00
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	621,732,920	1	19,250,000	1	450,662,970	0	444,962,000	98.73	0	0	464,212,000	74.66
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5	737,468,000	1	672,468,000	1	672,468,000		0	0.00	0	0	672,468,000	91.19
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	4,160,188,731	100	590,229,799	100	621,481,100	100	589,167,427	94.80	100	791,375,672	1,970,772,898	47.37
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	20,700,000	1	5,500,000	1	19,898,000	1	1,989,000	10.00	1	3,300,000	10,789,000	52.12
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	5	2,459,133,401	1	340,597,356	1	318,970,000	1	306,939,557	96.23	1	504,495,959	1,152,032,872	46.85

					dan Listrik yang Disediakan													
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	75,410,400	1	5,090,000	1	12,568,400	1	12,474,030	99.25	1	13,724,970	31,289,000	41.49
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	1,604,944,930	1	239,042,443	1	270,044,700	1	267,764,840	99.16	1	269,854,743	776,662,026	48.39
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	15	3,602,224,091	15	499,197,244	15	508,528,680	15	487,758,328	95.92	15	507,112,260	1,494,067,832	41.48
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	5	2,456,670,500	1	270,260,244	1	336,806,000	1	327,445,328	97.22	4	382,986,900	980,692,472	39.92
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	345,000,791	2	38,837,000	1	49,560,000	2	38,837,000	78.36	20	30,000,000	107,674,000	31.21
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	740,552,800	1	190,100,000	1	122,162,680	1	121,476,000	99.44	1	94,125,360	405,701,360	54.78

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	60,000,000	0	-	0	-	0	-	0.00	0	-	0	0.00
1	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100	9,424,738,605	3	6,313,095,700	3	593,522,000	3	567,784,500	9.26	1	547,600,000	7,428,480,200	78.82
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	15	9,424,738,605	-	6,313,095,700	-	593,522,000	-	567,784,500	95.66	1	547,600,000	7,428,480,200	78.82
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1500	332,607,900	300	14,146,900	300	75,000,000	26	54,975,000	73.30	300	75,000,000	144,121,900	43.33
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah	5	363,000,000	1	0	1	39,525,000	13	38,627,500	97.73	13	72,600,000	111,227,500	30.64

					Kerja Kecamatan													
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	8,729,130,705	1	6,298,948,800	1	478,997,000	13	474,182,000	98.99	6	400,000,000	7,173,130,800	82.17
1	3			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	100	29,352,666,765		12,585,271,000		12,649,497,046		12,585,271,000	0.00	100	26,224,773,900	51,395,315,900	175.10
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	1	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	65	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	35	208,045,900	208,045,900	160.04
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	prosentase efektifitas pelayanan kepada masyarakat	100	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	2	208,045,900	208,045,900	160.04
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	100	29,192,666,765	100	12,585,271,000	100	12,649,497,046		12,585,271,000	99.49	100	26,016,728,000	51,187,270,000	175.34

				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1	30,533,353	0	0	0	0	0	0	0.00	2	996,728,000	996,728,000	3,264.39
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5	29,162,133,412	1	12,585,271,000	1	12,649,497,046	1	12,585,271,000	99.49	1	25,020,000,000	50,190,542,000	172.11
1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh	100	98,770,000	2	31,200,000	2	32,000,000	2	31,200,000	61.73	2	32,000,000	59,262,000	60.00
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	98,770,000		19,754,000		19,754,000		19,754,000	100.00		19,754,000	59,262,000	60.00
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	98,770,000	1	19,754,000	1	19,754,000	1	19,754,000	100.00	1	19,754,000	59,262,000	60.00

				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	65 Persen	50,000,000	100	0	0	0	0	0	0.00	65	25,000,000	25,000,000	50.00
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	1	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	1	25,000,000	25,000,000	50.00
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	2	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	1	25,000,000	25,000,000	50.00
1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	80	173,396,250	100	40,188,400	100	43,803,750	100	40,188,400	52.08	100	101,615,000	181,991,800	104.96
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	80	173,396,250		40,188,400		43,803,750		40,188,400	91.75		101,615,000	181,991,800	104.96

				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	-	1	22,810,900	1	22,811,250		22,810,900	100.00	1	22,811,250	68,433,050	#DIV/0!
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi	13	41,985,000	6	17,377,500	6	20,992,500		17,377,500	82.78	0	0	34,755,000	82.78
				Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	43,803,750	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5	87,607,500	0	0	0	0	100	0	0.00	1	78803750	78,803,750	89.95

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Muara Badak dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah tertuang Renstra Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Muara Badak telah menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Muara Badak selama kurun waktu tahun 2021-2026 cukup baik. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Muara Badak yang dapat terealisasi Anggaran dua tahun terakhir 2022 sebesar 96.86% dan tahun 2023 sebesar 94.3 % dari target yang telah ditentukan.

Terdapat 3 (Tiga) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Muara Badak, yaitu :

a. Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan
b. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
c. Cakupan Aksesibilitas antar Wilayah Kecamatan Muara Badak

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel 2.1 & tabel 2.2 berikut, dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring & evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran dan Capaian Kinerja Prosentase Indek Kepuasan Masyarakat dan Prosentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Muara Badak dapat dilihat dari Tabel T-C.30 pada lampiran.

Tabel T-C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN MUARA

BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian	Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	-	Persentase Kepuasan Masyarakat	71.00%	72.00%	72.70%	73.00%	74.00%	87.72%	87.72%	87.72%	Peningkatan Pelayanan dan Jumlah ASN
2	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	-	Persentase Keluhan Masyarakat	65.00%	70.00%	75.00%	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Peningkatan Pelayanan dan Jumlah ASN
4	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	Presentase Capaian Ketentraman	65.00%	71.00%	74.00%	78.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Peningkatan Kinerja dan Jumlah ASN
5	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	-	Persentase Peertumbuhan PADes	92.00%	95.00%	97.00%	99.00%	100.00%	80.77%	81.77%	82.77%	Perlu adanya review nilai target kinerja
6	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	-	Nilai Pertumbuhan	68.00%	74.00%	82.00%	89.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Surat Pernyataan Camat tentang Kewenangan Pungutan PAD tidak ada karena sudah menjadi kewenangan OPD Teknis

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Muara Badak tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh factor eksternal dan faktor internal.

Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Muara Badak berikut.

a. Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering Mengalami Perubahan Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan tersebut seringkali mengalami distorsi.

b. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)

   Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun keterlibatan tersebut masih bersifat elit, mengingat peserta musrenbang yang menghadiri secara umum para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.

c. Keberadaan sumber daya yang meliputi sumberdaya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi factor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap Kecamatan Muara Badak :

1. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia yang dimiliki.
   Sumber Daya Manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun kalau dilihat dari segi kualitas berdasarkan spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM yang ada belum memadai untuk dapat mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan dengan baik. Sehingga untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas masih sangat rendah, dengan ini diharapkan agar fungsi perencanaan pembangunan terlaksana dengan baik maka sekiranya dapat menyediakan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas secara memadai.
2. Keterbatasan Anggaran dan Pengelolaannya Belum Sepenuhnya Berbasis Kinerja. Keterbatasan anggaran dibeberapa program dan kegiatan menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan capaian yang telah ditargetkan.
3. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program – program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusikan dengan baik.

Rancangan Awala Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak Tahun 2025 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari :

a) Pemantapan percepatan penyelenggaraan Reformasi dan Birokrasi
b) Peningkatan kualitas pelayanan melalui penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
c) Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana wilayah kecamatan.

Langkah-langkah strategis yang baik disetiap program dan kegiatan

prioritas di masing-masing perangkat daerah yaitu :

a) Penguatan kolaborasi pembiayaan pembangunan daerah baik melalui pemerintah maupun non pemerintah.
b) Kesetaraan antara para pemangku *kepentingan* dari unsur Pemerintah dan non pemerintah,
c) Keterwakilan yang mewadai dari seluruh segmen masyarakat terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal,
d) Berperan aktif pada pelaksanaan musrenbang RKPD dari segi penerapan perencanaan partisipatif,
e) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan serta prioritas program.

2.4 Review Terhadap Rancangan Rencana Awal RKPD.

Review rancangan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah perbandingan antara program/kegiatan yang tertuang ke dalam rancangan awal dengan pagu indikatif kecamatan berdasarkan kuota/hasil analisis kebutuhan Pernagkat Daerah atau adanya perubahan program kegiatan yang tidak sesuai dengan tupoksi OPD.

Dalam Review rancangan awal rencana kerja RKPD terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, sehingga mengakibatkan ketidak cocokan antara program dan kegiatan berbeda besaran anggarannya.

Review secara rinci dapat disampaikan sebagaimana dalam tabel TC.31 berikut :

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : MUARA BADAK

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		6,004,150,157	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA			7,467,287,831	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	134,790,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	134,790,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	40,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	40,000,000	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9,520,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9,520,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10,270,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10,270,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	55,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	55,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	3 Laporan	3,740,878,304	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	3 Laporan	4,280,442,575	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan	25 org/bulan	3,590,653,404	Penyediaan Gaji dan	Jumlah ASN yang mendapatkan	26 org/bulan	4,130,217,675	Kenaikan Gaji dan

		Tunjangan			Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan			Tunjangan ASN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25,184,900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25,184,900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	125,040,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	125,040,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	2 Laporan	65,800,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	4 Laporan	340,800,000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	200,000,000	Permbuatan Pagar di Aset Tanah di Lingkungan kantor camat
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan		Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah laporan Barang Milik	3 Laporan		

	Barang Milik Daerah pada SKPD	pada SKPD yang direkonsiliasi		40,800,000	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi		140,800,000	
	Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah		24 orang/bulan	40,800,000	Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah		24 orang/bulan	40,800,000	
					Pendampingan Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 kegiatan	50,000,000	Belum Pernah dianggarkan dan perlu kegiatan pendampingan
					Inventarisasi Aset		1 Kegiatan	50,000,000	Belum Pernah dianggarkan dan perlu inventarisasi Aset yang menjadi kewenangan Kecamatan
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan	49,092,792	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi	1 Laporan	290,000,000	

						Kepegawaian			
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	49,092,792	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	150,000,000	Bimtek,Sosialiasi, Penda mpingan,Worksho p
7.01.01.2.05.02					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapa nnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26 Stel	140,000,000	
					Biaya Pengadaan Pakaian Adat PDH Miskat		26 Stel	45,000,000	Belum Pernah dianggarkan 3 Tahun terakhir
					Pengadaan Pakaian Olahraga Lengkap Baju, Celana Training, Sepatu, Kaos Kaki dan Topi)		26 Stel	65,000,000	Belum Pernah dianggarkan 5 Tahun terakhir

					Biaya Pengadaan Pakaian Dinas (Pakaian Dinas Lapangan)		26 Stel	30,000,000	Belum Pernah dianggarkan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	68 Persen	577,587,349	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	68 Persen	583,000,000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18,000,000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	35,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	35,000,000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	99,707,349	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	120,000,000	Meningkatnya Aktifitas dan kegiatan kecamatan

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	25,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	25,000,000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	85,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25,000,000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan	244,880,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan	280,000,000	Meningkatnya Aktifitas dan kegiatan kecamatan
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50,000,000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 paket	20,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis		1 paket	30,000,000	

					Elektronik pada SKPD				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	1 Unit	105,800,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	1 Unit	401,506,000	
	Pengadaan Mebel			40,800,000	Pengadaan Mebel			47,882,000	
	Pengadaan Kursi Sofa		2 Unit	17,562,000	Pengadaan Kursi Sofa		2 Unit	17,562,000	Sarana Penunjang untuk Gedung BPU Kecamatan belum ada
	Pengadaan Meja Rapat		3 Unit	23,238,000	Pengadaan Meja Rapat		5 Unit	30,320,000	Sarana Penunjang untuk Gedung BPU Kecamatan belum ada
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung			65,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana			353,624,000	

	Kantor atau Bangunan				Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan				
	Kursi Plastik		100	17,000,000	Kursi Plastik		500	97,500,000	Sarana Penunjang untuk Gedung BPU Kecamatan belum ada
	Mimbar (Podium Pidato)		1 Buah	10,000,000	Mimbar (Podium Pidato)		1 Buah	10,000,000	Sarana Penunjang untuk Gedung BPU Kecamatan belum ada
	Laptop/Ipad		2	38,000,000	Laptop/Ipad		2	38,000,000	Penunjang Camat dan sekcam
					Ac Standing		4	86,124,000	Sarana Penunjang untuk Gedung BPU Kecamatan belum ada
					Pengadaan Sound System		1	61,000,000	Sarana Penunjang untuk Gedung BPU

									Kecamatan belum ada
					Pengadaan Scanner		5	61,000,000	Kebutuhan Kantor Kecamatan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67 Persen	681,430,352	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67 Persen	832,977,896	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	3,300,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	3,300,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	395,707,209	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	547,254,753	Adanya penambahan Rekening Listrik
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	1 laporan	12,568,400	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	1 laporan	12,568,400	

					Kantor				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"	1 laporan	269,854,743	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"	1 laporan	269,854,743	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	1 Laporan	648,771,360	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	1 Laporan	603,771,360	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	452,986,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	452,986,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	90,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	20 unit	45,000,000	

						Dipelihara			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	105,785,360	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	105,785,360	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Kegiatan	6,070,533,353	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Kegiatan	6,870,533,353	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi		220,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi		220,000,000	

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		220,000,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		220,000,000	
	Fasilitasi Kegiatan POKJANAL	Fasilitasi Kegiatan Pokjanal		25,000,000	Fasilitasi Kegiatan POKJANAL	Fasilitasi Kegiatan Pokjanal		25,000,000	
	LINMAS	Linmas	31 orang	195,000,000	LINMAS	Linmas	31 orang	195,000,000	Honor Linmas dan Operasional (belum teranggarkan)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2 Laporan	5,850,533,353	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Dokumen	6,650,533,353	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		800,000,000	
					Penanganan Sampah Diwilayah kecamatan			500,000,000	Pengelolaan Sampah Kecamatan
					Pusat Satu Data (SDI)			300,000,000	Kegiatan Pendukung SDI Kecamatan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	5,850,533,353	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	5,850,533,353	
	Pembangunan Panggung Upacara di Halaman Kantor Camat			225,000,000		Pembangunan Panggung Upacara di Halaman Kantor Camat		225,000,000	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana BPU Kecamatan			225,000,000		Pengadaan Sarana dan Prasarana BPU Kecamatan		225,000,000	
	Peningkatan Jalan RT 11 Desa Badak Baru			225,000,000		Peningkatan Jalan RT 11 Desa Badak Baru		225,000,000	
	Peningkatan Jalan Ke arena Bumi Perkemahan			225,000,000		Peningkatan Jalan Ke arena Bumi Perkemahan		225,000,000	
	Peningkatan Jalan Blok H Badak Makmur			225,000,000		Peningkatan Jalan Blok H Badak Makmur		225,000,000	
	Peningkatan Jalan Oscar			225,000,000		Peningkatan Jalan Oscar		225,000,000	
	Peningkatan Jalan menuju panti asuhan Al Amin			225,000,000		Peningkatan Jalan menuju panti asuhan Al Amin		225,000,000	
	Pembangunan Drainase Sekitar Lapangan Kantor Camat Muara Badak			225,000,000		Pembangunan Drainase Sekitar Lapangan Kantor Camat Muara Badak		225,000,000	
	Pembangunan Taman di sekitar lapangan Kantor Camat Muara Badak			225,000,000		Pembangunan Taman di sekitar lapangan Kantor Camat Muara Badak		225,000,000	
	Penimbunan RT 10 - RT 31 Badak baru			225,000,000		Penimbunan RT 10 - RT 31 Badak baru		225,000,000	

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Arena Bumi Perkemahan			225,000,000		Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Arena Bumi Perkemahan		225,000,000	
	Pembangunan Panggung Upacara di Area Bumi Perkemahan			225,000,000		Pembangunan Panggung Upacara di Area Bumi Perkemahan		225,000,000	
	Pengadaan LPJU RT 5 da RT 6 Desa Batu batu			200,000,000		Pengadaan LPJU RT 5 da RT 6 Desa Batu batu		200,000,000	
	Lanjutan Rehab Kantor Danramil			225,000,000		Lanjutan Rehab Kantor Danramil		225,000,000	
	Lanjutan Rehab Mushola Kantor Camat			150,000,000		Lanjutan Rehab Mushola Kantor Camat		150,000,000	
	Lanjutan Rehab Rumah DTKS Kecamatan			150,000,000		Lanjutan Rehab Rumah DTKS Kecamatan		150,000,000	
	Peningkatan Jalan area parkir kantor camat muara badak			100,000,000		Peningkatan Jalan area parkir kantor camat muara badak		100,000,000	
	Peningkatan Jalan menuju SDN 015 Desa Badak Baru			225,000,000		Peningkatan Jalan menuju SDN 015 Desa Badak Baru		225,000,000	

	Pembangunan paving blok lapangan			225,000,000		Pembangunan paving blok lapangan		225,000,000	
	Peningkatan Jalan Terminal Desa Batu Batu			200,000,000		Peningkatan Jalan Terminal Desa Batu Batu		200,000,000	
	Peningkatan Jalan menuju kuburan desa Batu batu			200,000,000		Peningkatan Jalan menuju kuburan desa Batu batu		200,000,000	
	Pembangunan Taman Kantor Camat			100,000,000		Pembangunan Taman Kantor Camat		100,000,000	
	Rehab Gudang Kearsipan Kantor Camat			150,533,353		Rehab Gudang Kearsipan Kantor Camat		150,533,353	
	Peningkatan Jalan Sekitar Lapangan kantor Camat			225,000,000		Peningkatan Jalan Sekitar Lapangan kantor Camat		225,000,000	
	Peningkatan Jalan Seribu			225,000,000		Peningkatan Jalan Seribu		225,000,000	
	Rehab Kantor Desa Persiapan Badak Makmur			200,000,000		Rehab Kantor Desa Persiapan Badak Makmur		200,000,000	
	Pemangunan LPJU Jalan Badak 16			150,000,000		Pemangunan LPJU Jalan Badak 16		150,000,000	
	Peningkatan Jalan menuju pesantren					Peningkatan Jalan menuju pesantren			

	desa badak baru			225,000,000		desa badak baru		225,000,000	
	Peningkatan Jembatan Kampung Menado RT 9			200,000,000		Peningkatan Jembatan Kampung Menado RT 9		200,000,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	480,645,900	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1,312,645,900	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	1 laporan	480,645,900	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	1 laporan	1,312,645,900	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	78 lembaga	50,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	78 lembaga	90,000,000	

	Desa				Desa	Desa			
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	72,600,000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	72,600,000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	358,045,900	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1,150,045,900	
	Fasilitasi Kegiatan Erau	Fasilitasi Kegiatan Erau		25,045,900	Fasilitasi Kegiatan Erau			25,045,900	
	Fasilitasi Kegiatan Pramuka	Fasilitasi Kegiatan Pramuka		25,000,000	Fasilitasi Kegiatan Pramuka			25,000,000	

	Fasilitasi Kegiatan HUTT RI	Fasilitasi Kegiatan HUTT RI		80,000,000	Fasilitasi Kegiatan HUTT RI			125,000,000	Kegiatan Paskibraka dan Ramah Tamah dan Pembagian Bendera merah putih
	Fasilitasi Kegiatan MTQ	Fasilitasi Kegiatan MTQ		118,000,000	Fasilitasi Kegiatan MTQ			350,000,000	Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten
	Fasilitasi Kegiatan PKK	Fasilitasi Kegiatan PKK		110,000,000	Fasilitasi Kegiatan PKK			200,000,000	Kegiatan PKK dan Pembinaan PKK Desa
					Fasilitasi Kegiatan HKG			200,000,000	Pelaksanaan HKG Tingkat Kabupaten dan Kecamatan
					Fasiltasi Kegiatan Bupati CUP			75,000,000	Pelaksanaan mengikuti Bupati Cup
					Fasilitasi Kegiatan Merah			100,000,000	Kegiatan Merah Putih Sanga-sanga belum

					Putih				dianggarkan
					Lomba Mobil Legend Tingkat Kabupaten			50,000,000	Kegiatan Lomba Tingkat Kabupaten yang belum dianggarkan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	50,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	50,000,000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala	Jumlah urusan Pemerintahan yang dilaksanakan dikecamatan	kegiatan	50,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala	Jumlah urusan Pemerintahan yang dilaksanakan dikecamatan	kegiatan	50,000,000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	50,000,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	50,000,000	

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			19,754,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			35,000,000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	65 Persen	19,754,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	65 Persen	35,000,000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Lporan	19,754,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Lporan	35,000,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			43,084,650	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			285,000,000	

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	68 persen	43,084,650	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	68 persen	285,000,000	
					Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	35,000,000	Rencana Kegiatan Pilkades Serentak
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		1 kegiatan	150,000,000	Evaluasi APBDes (13 Desa) dan Aset Desa
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 laporan	43,084,650	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 laporan	100,000,000	Lomba Desa Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi
	JUMLAH			12,668,168,060				16,020,467,084	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka dokumen perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun propinsi.

3.1.1. Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kedudukan Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai kartanegara.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Tujuan :

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan Kecamatan Muara Badak dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka Tujuan yang relevan dengan

tugas dan fungsi Kecamatan Muara Badak adalah Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah dan Meningkatnya Aksesibilitas antar dan inter wilayah (Kabupaten).

Sasaran :

Berdasarkan pada Tujuan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Muara Badak, maka Sasaran yang hendak dicapai terlihat pada tabel 1.9 sebagai berikut:

Tabel :Tujuan dan Sasaran Kecamatan Muara BadakTahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahunan					
			Sasaran		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatka n kualitas pelayanan kecamatan	Meningkat nya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamata n	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	60	65	70	75	80	90
			Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	90	92	95	97	99	100
			Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	60	68	74	82	89	95
			Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum)	Persen	63	65	71	74	78	80

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Dalam rangka penetapan program dan kegiatan atau sinkronisasi antara formulasi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kantor Camat Muara Badak dengan RPJM Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka program dan kegiatan yang akan di jalankan selama priode 2021-2026 bentuk sinkronisasi dengan program dan kegiatan yang telah didukung oleh sumber pendanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 yang akan datang yang dalam penyusunannya telah berpedoman pada RPJM Daerah.

Penyusunan Rancangan Awala Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 tidak terlepas dari Visi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara Yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia” hal ini sesuai dengan arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara berfokus pada Tata kelola Pemerintahan, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur wilayah, Lingkungan Hidup, Emonomi Unggulan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat.

Misi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

1. Memantapkan Birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani.
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas antar Wilayah.
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Tema Pembangunan Kutai kartanegara Tahun 2025 yaitu Memperkuat Landasan bagi Percepatan (Akselerasi) dan Pembaharuan (Transformasi) Pembangunan Berbasis Potensi Kewilayahan dan Komoditi Unggulan Daerah.

Adapun yang menjadi penekanan dalam perumusan rencana program dan kegiatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 yaitu :

1. Penguatan modal sosial dalam mendukung upaya penyediaan kebutuhan dasar dan penurunan kemiskinan daerah.
2. Pengembangan potensi sektor ekonomi terbarukan dalam menopang perekonomian daerah dalam jangka panjang.
3. Penguatan kompetensi birokrasi yang handal dan melayani.

Ketiga pokok permasalahan tersebut diorientasikan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 sebagai penjabaran dari RPJM Kutai Kartanegara 2021-2026,

serta menjadi kebijakan umum dalam penyusunan RKPD merupakan penguatan terhadap potensi ekonomi terbarukan dalam rangka pembangunan potensi perekonomian yang kuat dan berkelanjutan, hal ini ditetapkan pertanian pariwisata sebagai sektor kunci perekonomian daerah dalam perspektif pembangunan ekonomi jangka panjang. Serta meningkatkan keterpaduan pembangunan wilayah dalam konteks pengembangan infrastruktur dan komoditi unggulan daerah dalam skema keterpaduan potensi antar wilayh, sehingga pembangunan tidak hanya melalui pendekatan sektoral namun harus memperhatikan potensi kewilayahan secara komprehensif, serta peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan dasa, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha khususnya kepada masyarakat.

Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak Tahun 2025 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari :

a)Pemantapan percepatan penyelenggaraan Reformasi dan Birokrasi

b) Peningkatan kualitas pelayanan melalui penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

c)Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana wilayah kecamatan.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Muara Badak Tahun 2025 dan Prakiraan maju Tahun 2026 akan disajikan pada tabel TC-33 di bawah ini.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN MUARA BADAKKAB. KUTAI KARTANEGARA AHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Kecamatan Muara Badak						12.668.168.060,00							13.026.626.971,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						12.668.168.060,00							13.026.626.971,00	
	7	01				KECAMATAN						12.668.168.060,00							13.026.626.971,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77Nilai			70 Nilai 74 Nilai	6.004.150.157,00						77Nilai	6.362.609.068,00	

	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	134.790.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	Kecamatan Muara Badak	-	185.270.000,00	

															publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokume n	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkat an tata kelola pemerinta han daerah yang profesiona l dan akuntabel untuk menduku ng transform asi pelayanan publik Penataan dan Pengemba ngan Tata Kelola	Kecamatan Muara Badak		75.000.000,00	KECAMAT AN MUARA BADAK

															Pemerintah dan Pelayanan Publik					

	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
							Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				1 Dokume n	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkat an tata kelola pemerinta han daerah yang profesiona l dan akuntabel untuk menduku ng transform asi pelayanan publik Penataan dan Pengemba ngan Tata Kelola Pemerinta han dan Pelayanan Publik	Kecama tan Muara Badak		15.000.000,00	KECAMAT AN MUARA BADAK
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													

							Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				1 Dokume n	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkat an tata kelola pemerinta han daerah yang profesiona l dan akuntabel untuk menduk un g transform asi pelayanan publik Penataan dan Pengemba ngan Tata Kelola Pemerinta han dan Pelayanan Publik	Kecama tan Muara Badak		15.000.000,00	KECAMAT AN MUARA BADAK
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															

							Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD				1 Dokume n	9.520.000,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkat an tata kelola pemerinta han daerah yang profesiona l dan akuntabel untuk	Kecama tan Muara Badak		15.000.000,00	KECAMAT AN MUARA BADAK

																menduk un g transfor m asi pelayana n publik Penataa n dan Pengem ba ngan Tata Kelola Pemerint a han dan Pelayana n Publik				
	7	0 1	0 1	2. 0 1	0 0 0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															

							Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD				1 Dokume n	10.270.000,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkat an tata kelola pemerinta han daerah yang profesiona l dan akuntabel untuk mendukun g transform asi pelayanan publik Penataan dan Pengemba ngan Tata Kelola Pemerinta	Kecamatan Muara Badak		10.270.000,00	KECAMAT AN MUARA BADAK

																han dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkat an tata kelola pemerinta han daerah yang profesiona l dan akuntabel untuk mendukun g transform asi pelayanan publik Penataan dan Pengemba ngan Tata Kelola	Kecamatan Muara Badak		55.000.000,00	KECAMAT AN MUARA BADAK

																Pemerintahan dan Pelayanan Publik				

	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.740.878.304,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	4.280.442.575,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang /b ulan	3.590.653.404,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkat an tata kelola pemerinta han daerah yang profesiona l dan akuntabel untuk	-		4.130.217.675,00	KECAMAT AN MUARA BADAK

																	menduk un g transfor m asi pelayana n publik Penataa n dan Pengem ba ngan Tata Kelola Pemerint a han dan Pelayana n Publik					
	7	0 1	0 1	2. 0 2	0 0 0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	25.184.900,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkat an tata kelola pemerinta han daerah yang profesiona l dan akuntabel untuk mendukun g transform asi pelayanan publik Penataan dan Pengemba ngan Tata Kelola Pemerinta	-		25.184.900,00	KECAMAT AN MUARA BADAK

																han dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	125.040.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-		125.040.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK

																Pemerintahan dan Pelayanan Publik				

	7	0 1	0 1	2. 0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	65.800.000,00			-	7. Peningk at an tata kelola pemerint a han daerah yang profesio na l dan akuntab el untuk menduk un g transfor m asi pelayana n publik Penataa n dan Pengem ba ngan Tata Kelola Pemerint a han dan Pelayana n Publik	-	-	65.800.000,00		
	7	0 1	0 1	2. 0 3	0 0 0 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD															

							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokume n	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkat an tata kelola pemerinta han daerah yang profesiona l dan akuntabel untuk	-		25.000.000,00	KECAMAT AN MUARA BADAK

																	menduk un g transfor m asi pelayana n publik Penataa n dan Pengem ba ngan Tata Kelola Pemerint a han dan Pelayana n Publik				
	7	0 1	0 1	2. 0 3	0 0 0 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD															

							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	40.800.000,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkat an tata kelola pemerinta han daerah yang profesiona l dan akuntabel untuk mendukun g transform asi pelayanan publik Penataan dan Pengemba ngan Tata Kelola Pemerinta	-		40.800.000,00	KECAMAT AN MUARA BADAK

																han dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	49.092.792,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayana	-	-	49.092.792,00	

																n Publik				
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				26 Orang	49.092.792,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkat an tata kelola pemerinta han daerah yang profesiona l dan akuntabel untuk mendukun g transform asi pelayanan publik Penataan dan Pengemba ngan Tata Kelola Pemerinta han dan Pelayanan Publik	-		49.092.792,00	KECAMAT AN MUARA BADAK

	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	577.587.349,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi	-	-	557.587.349,00	

															pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	18.000.000,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkat an tata kelola pemerinta han daerah yang profesiona l dan akuntabel untuk mendukun g transform asi pelayanan publik Penataan dan Pengemba ngan Tata Kelola	-		18.000.000,00	KECAMAT AN MUARA BADAK

																Pemerintahan dan Pelayanan Publik				

	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		35.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	99.707.349,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		99.707.349,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk	-		25.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK

																	menduk un g transfor m asi pelayana n publik Penataa n dan Pengem ba ngan Tata Kelola Pemerint a han dan Pelayana n Publik				
	7	0 1	0 1	2. 0 6	0 0 0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu															

							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	85.000.000,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkat an tata kelola pemerinta han daerah yang profesiona l dan akuntabel untuk mendukun g transform asi pelayanan publik Penataan dan Pengemba ngan Tata Kelola Pemerinta	-		85.000.000,00	KECAMAT AN MUARA BADAK

																han dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	244.880.000,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkat an tata kelola pemerinta han daerah yang profesiona l dan akuntabel untuk menduku ng transform asi pelayanan publik Penataan dan Pengemba ngan Tata Kelola	-		244.880.000,00	KECAMAT AN MUARA BADAK

																Pemerintah dan Pelayanan				

																Publik				
	7	0 1	0 1	2. 0 6	0 0 1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 Dokume n	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkat an tata kelola pemerinta han daerah yang profesiona l dan akuntabel untuk mendukun g transform asi pelayanan publik Penataan dan Pengemba ngan Tata	-		50.000.000,00	KECAMAT AN MUARA BADAK

																Kelola Pemerinta han dan Pelayanan				

																Publik				
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintaha n daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerint	-			0,00	KECAMATAN MUARA BADAK

																a han dan Pelayana n Publik				

	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	105.800.000,00			-	7. Peningkat an tata kelola pemerinta han daerah yang profesiona l dan akuntabel untuk mendukun g transform asi pelayanan publik Penataan dan Pengemba ngan Tata Kelola Pemerinta han dan Pelayanan Publik	-	-		0,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	40.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk	-			0,00	KECAMATAN MUARA BADAK

																menduk un g transfor m asi pelayana n publik Penataa n dan Pengem ba ngan Tata Kelola Pemerint a han dan Pelayana n Publik				
	7	0 1	0 1	2. 0 7	0 0 1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															

							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	65.000.000,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkat an tata kelola pemerinta han daerah yang profesiona l dan akuntabel untuk mendukun g transform asi pelayanan publik Penataan dan Pengemba ngan Tata Kelola Pemerinta	-			0,00	KECAMAT AN MUARA BADAK

																han dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	681.430.352,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-	-	681.430.352,00	

																Publik				
	7	0 1	0 1	2. 0 8	0 0 0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.300.000,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkat an tata kelola pemerinta han daerah yang profesiona l dan akuntabel untuk mendukun g transform asi pelayanan publik Penataan dan Pengemba ngan Tata Kelola Pemerinta han dan Pelayanan Publik	-		3.300.000,00	KECAMAT AN MUARA BADAK
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	395.707.209,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkat an tata kelola pemerinta han daerah yang profesiona l dan akuntabel untuk	-		395.707.209,00	KECAMAT AN MUARA BADAK
															mendukun g transform asi pelayanan publik Penataan dan Pengemba ngan Tata Kelola Pemerinta han dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12.568.400,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkat an tata kelola pemerinta han daerah yang profesiona l dan akuntabel untuk mendukun g transform asi pelayanan publik Penataan dan Pengemba ngan Tata Kelola Pemerintah	-		12.568.400,00	KECAMAT AN MUARA BADAK
																han dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	269.854.743,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkat an tata kelola pemerinta han daerah yang profesiona l dan akuntabel untuk mendukun g transform asi pelayanan publik Penataan dan Pengemba ngan Tata Kelola Pemerinta han dan Pelayanan Publik	-		269.854.743,00	KECAMAT AN MUARA BADAK

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	648.771.360,00			-	7. Peningkat an tata kelola pemerinta han daerah yang profesiona l dan akuntabel untuk mendukun g transform asi pelayanan publik Penataan dan Pengemba ngan Tata Kelola Pemerinta han dan Pelayanan Publik	-	-	542.986.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	452.986.000,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkat an tata kelola pemerinta han daerah yang profesiona l dan akuntabel untuk	-		452.986.000,00	KECAMAT AN MUARA BADAK
																menduk un g transform asi pelayanan publik Penataan dan Pengemba ngan Tata Kelola Pemerinta han dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkat an tata kelola pemerinta han daerah yang profesiona l dan akuntabel untuk mendukun g transform asi pelayanan publik Penataan dan Pengemba ngan Tata Kelola Pemerintah	-		90.000.000,00	KECAMAT AN MUARA BADAK
																han dan Pelayanan Publik				
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi				1 Unit	105.785.360,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkat an tata kelola pemerinta han daerah yang profesiona l dan akuntabel untuk mendukun g transform asi pelayanan publik Penataan dan Pengemba ngan Tata Kelola Pemerinta han dan Pelayanan Publik	-			0,00	KECAMAT AN MUARA BADAK
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	100 Persen			100 Persen	6.070.533.353,00							100 Persen	6.070.533.353,00	

	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	220.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Muara Badak	-	220.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	220.000.000,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkat an tata kelola pemerinta han daerah yang profesiona l dan akuntabel untuk menduku ng transform asi pelayanan publik Penataan dan Pengemba ngan Tata Kelola Pemerinta han dan Pelayanan Publik	Kecamatan Muara Badak		220.000.000,00	KECAMAT AN MUARA BADAK

	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	5.850.533.353,00			-	4. Penguatan infrastrukt ur untuk mendukun g pengemba ngan ekonomi dan pelayanan dasar Percepata n pembangu nan desa	-	-	5.850.533.353,00	
																dan kawasan perdesaan				
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														

							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	5.850.533.353,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penguatan infrastrukt ur untuk mendukun g pengemba ngan ekonomi dan pelayanan dasar Percepata n pembangu nan desa dan kawasan perdesaan	-		5.850.533.353,00	KECAMAT AN MUARA BADAK
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	480.645.900,00						-	480.645.900,00	

	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	480.645.900,00			-	4. Penguatan infrastrukt ur untuk mendukun g pengemba ngan ekonomi dan pelayanan dasar Percepata n pembangu nan desa dan kawasan perdesaan	-	-	480.645.900,00		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa															

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				78 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penguatan infrastrukt ur untuk mendukun g pengemba ngan ekonomi dan pelayanan dasar Percepata n pembangu nan desa dan kawasan perdesaan	-		50.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7	0	0	2.	0	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
		1	3	0 1	0 0 2															

							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokume n	72.600.000,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penguatan infrastrukt ur untuk mendukun g pengemba ngan ekonomi dan pelayanan dasar Percepata n pembangu nan desa dan kawasan perdesaan	-		72.600.000,00	KECAMAT AN MUARA BADAK
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	358.045.900,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penguatan infrastrukt ur untuk mendukun g pengemba ngan ekonomi dan pelayanan dasar Percepata n pembangu nan desa sebagai	-		358.045.900,00	KECAMAT AN MUARA BADAK

																basis produksi pangan dan pemberd a yaan masyara ka t				
4	7	0 1	0 4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	19.754.000,00						-	19.754.000,00	

	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	19.754.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	19.754.000,00	

	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	19.754.000,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkat an tata kelola pemerinta han daerah yang profesiona l dan akuntabel untuk mendukun g transform asi pelayanan publik Penataan dan Pengemba ngan Tata Kelola Pemerinta han dan Pelayanan Publik	-		19.754.000,00	KECAMAT AN MUARA BADAK
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	

	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	50.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															

							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokume n	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkat an tata kelola pemerinta han daerah yang profesiona l dan akuntabel untuk	-		50.000.000,00	KECAMAT AN MUARA BADAK

																menduk un g transfor m asi pelayana n publik Penataa n dan Pengem ba ngan Tata Kelola Pemerint a han dan Pelayana n Publik				
6	7	0 1	0 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTAH AN DESA	-	-			-	43.084.650,00						-	43.084.650,00	

	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	43.084.650,00			-	7. Peningkat an tata kelola pemerinta han daerah yang profesiona l dan akuntabel untuk mendukun g transform asi pelayanan publik Penataan dan Pengemba ngan Tata Kelola	-	-	43.084.650,00	

																Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	43.084.650,00	Kab. Kutai Kartaneg ara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkat an tata kelola pemerinta han daerah yang profesiona l dan akuntabel untuk menduk un g transform asi pelayanan publik Penataan dan Pengemba ngan Tata Kelola Pemerint	-		43.084.650,00	KECAMAT AN MUARA BADAK

																a han dan Pelayana n Publik			
	J U M L A H										12.668.168.060,00							13.026.626.971,00	

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Awal (Renwal) Kecamatan Muara Badak Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Muara Badak Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rancangan Awal Renja Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024. Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak , maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Muara Badak diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain

Untuk mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ini, akan diadakan evaluasi dan

uu.RENJA KECAMATAN MARANGKAYU

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good Governance* yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonomi karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat semakin komplek tugas camat, perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan Perekonomian di tingkat Kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat.

Dan dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa

setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan ayat (2) Pasal 2),dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi "KUKAR IDAMAN" yang dicanangkan sejak terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026 serta keberhasilan *(success story)* pada pelaksanaan pembangunan sebelumnya yakni GERBANG RAJA yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode sebelumnya.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan dalam menyusun Rencana AwalTahun 2023 adalah sebagai berikut :

1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9 Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10 Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

15 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

16 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Marangkayu selama tahun 2024 dengan berpedoman pada Rancangan Akhir RKPD dan Renstra Kecamatan.

2 Tujuan :

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Camat Marangkayu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja -PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Program dan Kegiatan
BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan.

Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Recana Kerja (Renja) Kecamatan Marangkayu Tahun 2022 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan Visi Kukar Idaman yaitu "BERGERAK SEARAH MENUJU KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA” dengan misi 1 Memantapkan

Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani serta misi 4 Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Marangkayu telah melaksanakan kegiatan

yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya dan telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu :

a. Menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.

b. Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah

   Evaluasi pelaksanaan Renja-PD merupakan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2/2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja-PD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu, dan realisasi Renstra- PD

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021, pelaksanaan kinerja Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan Perangkat Daerah Belanja Langsung Urus Wajib dan Pilihan (Program), sebagaimana dijabarkan dalam Tabel T-C.29 berikut ini :

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Kutai Kartanegara Nama OPD : Kecamatan MARANGKAYU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 20162021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2020)			Target program / kegiatan (Renja- PD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja-PD tahun (2020)	Realisasi Renja-PD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
0000.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran								
01.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening	480	384	100	100	100%	240	480	100%
01.004	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah aparatur	60	40	100	100	100%	0	30	60%
01.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah Kend Dinas	102	17	100	100	0%	17	102	100%
01.005	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat pembersih	30	5	25	25	100%	30	30	100%
01.006	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah/Jenis	132	22	22	22	100%	40	132	100%

1	2	3	s/d 2021	2020	6	7	8	9	10	11
01.011	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Porsi	8400	1400	1400	1400	100%	1400	3300	100%
01.013	Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	Jumlah staf pendukung	120	100	100	100	58%	100	120	87%
01.007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	54188	24094	10047	10047	100%	10047	44188	82%
01.012	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah Kegiatan	215	90	80	80	100%	102	272	127%
	Penataan Arsip Perangkat	Jumlah berkas	1500		1000	1000	100%	500	1500	100%
0000.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana prasarana aparatur kondisi baik								
02.001	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah/item	53	44	6	6	100%		50	94%
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah/item	23	19	19	19	100%	19	19	100%
02.003	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung	5	3	1	2	200%	2	7	140%
02.003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah Kend Dinas	102	85	17	17	100%	17	100	100%

02.031	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah/item	37	24	30	30	100%	0	37	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0000.03	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan	21	0	21	21	100%		21	100%
06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen	2	0	1	1	100%	1	2	100%
06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan	12	0	10	10	100%	2	12	100%
0000.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur								
	Fasilitasi Tim BEKIAS		1	1	0	0	0%	0	1	100%
0408.46	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Tingkat partisipasi Masyarakat	3175	1905	545	485	89%		2390	75%

	Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas	Jumlah personil	1116	1116	0	0	0%	0	1116	100%
46.004	Fasilitasi Pelayanan Linmas	Jumlah personil	744		372	372	100%	372	744	100%
46.003	Fasilitasi/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Jumlah lembaga	15	9	3	3	100%		12	80%
46.002	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ	jumlah peserta	300	180	60	0	0%	0	180	60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.001	Fasilitasi Pelaksanaan MUSRENBANG	jumlah peserta	500	300	100	100	100%	100	500	100%
46.005	Fasilitasi Pelaksanaan HUT RI	Jumlah peserta	500	300	10	10	100%	100	410	82%
0103.52	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasasarana Umum Kecamatan	cakupan Sarana prasarana kondisi baik	169	156	4	4	100%	0	160	95%
52.002	Pembangunan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan	Jumlah Unit	29	16	4	4	100%		20	69%

0103.54	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan	Cakupan Jalan jembatan Kecamatan dalam kondisi Baik	14521	6188	4936	5923	120%		12111	83%
	Peningkatan / Pemeliharaan Jalan Kecamatan Marangkayu	panjang jalan	1926	1926			0%		1926	100%
	Pembangunan Jembatan Kecamatan Marangkayu	jumlah unit	1	1			0%		1	100%
54.001	Pembangunan Jalan Kecamatan	panjang jalan	267		267	267	100%		267	100%
	Pembangunan Turap	Jumlah unit	5		5	5	100%		5	100%
54.003	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Kecamatan Marangkayu	panjang jalan	12317	4259	4653	5640	121%		9899	80%
54.004	Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Kecamatan	Jumlah unit	1		9	9	100%		9	900%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.002	Pembangunan Jembatan Kecamatan Marangkayu	Jumlah unit	4	2	2	2	100%		4	100%
0103.55	Program Pembangunan /Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong- gorong Kecamatan	cakupan saluran gorong-gorong kecamatan kondisi baik	773	323	200	200	100%		523	68%

55.001	Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan	Panjang saluran drainase yang dibangun	773	323	200	200	100%		523	68%
	Program pembangunan infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan		10	8	0	0	0%		8	80%
	Pembangunan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan	jumlah unit	10	8	0	0	0%		8	80%
0103.57	Program Pembangunan Turap Kecamatan	pembangunan turap kecamatan kondisi baik	1886	867	0	0	0%		867	46%
	Pembuatan Turap Kecamatan Marangkayu	panjang turap	943	253	0	0	0%		253	27%
57.001	Pembuatan Turap Kecamatan Marangkayu	panjang turap	943	614	0	0	0%		614	65%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat program dan kegiatan yang belum memenuhi target. Adapun program dan kegiatan yang belum memenuhi target disebabkan karena beberapa hal, antara lain :

a. Perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Nilai pada APBD lebih kecil dari nilai pada Renja.

Hal-hal yang diambil dalam mengatasi hal-hal tersebut adalah :

a. Melakukan pergeseran anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan.
b. Mengurangi dan menghapus beberapa kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada
(potensi lokal).

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien. Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Marangkayu selama kurun waktu tahun 2023 - 2024 diharapkan cukup memuaskan. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Marangkayu, yaitu : a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;

b. Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa;
c. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat dalam table T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.31.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Marangkayu
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator*)	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			Cc								
	Jumlah Dokumen			0	9	9	9	0		9	9	
	Jumlah laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			10	2	2	2	10		2	2	
	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan			10	10	10	10	10		10	10	
	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah				5	5	5			5	5	
	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah			12	12	12	12	12		12	12	

	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			10	10	10	10	10		10	10	
	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa			100	100	100	100	100		100	100	
	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa			11	11	11	11	11		11	11	
	Jumlah Kegiatan			4	4	4	4	4		4	4	
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100	100	100	100	100		100	100	
	Jumlah Desa yang difasilitasi			11	11	11	11	11		11	11	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis terkait dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD. Dan bagaimana dampaknya terhadap percapaian visi dan misi, target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatan pelayanan SKPD.

Pelayanan di Kecamatan Marangkayu pada umumnya telah berjalan dengan baik walaupun ada permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam peyelenggaraan tugas dan fungsinya. Kecamatan Marangkayu sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Marangkayu masih memerlukan peningkatan pelayanan untuk menghadapi tantangan kedepan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Belum optimalnya koordinasi linmas
2. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan di kecamatan
3. Belum optimalnya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan
4. Belum optimalnya pelayanan PATEN dan pelayanan sarana dan prasarana umum wilayah kecamatan
5. Belum optimalnya pelayanan dan koordinasi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, keagamaan, budaya, dan lembaga kemasyarakatan
6. Belum optimalnya kinerja dan tata kelola kecamatan

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Marangkayu, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan
2. Meningkatkan urusan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

4. Meningkatnya penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati
5. Meningkatkan pemeiliharaan prasarana dan layanan umum
6. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan
7. Meningkatkkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa

Permasalahan internal dan eksternal yang dihadapi akan berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Adapun Hal-hal yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada para staf kecamatan tentang tugas dan fungsi kecamatan serta keahlian yang harus dipelajari dan dimiliki oleh setiap staf.
2. Memaksimalkan rapat koordinasi pertriwulan dalam rangka melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan pemberdayaan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa.
3. Melibatkan pihak perusahan dalam kegiatan Musrenbang desa dan Musrenbang Kecamatan dalam rangka sinkronisasi rencana kegiatan pemerintahan desa yang bisa dibantu dilaksanakan oleh pihak perusahaan.

Dari beberapa aspek permasalahan yang dihadapi sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa potensi yang dimiliki antara lain :

1. Potensi dibidang perikanan yaitu adanya beberapa desa di sekitaran pesisir yang merupakan lokasi usaha perikanan baik kegiatan budidaya maupun kegiatan perikanan tangkap oleh nelayan.
2. Potensi Perkebunan Kelapa Sawit di desa Santan Ulu dan Karet di beberapa Desa.
3. Banyak pelaku UKM di 11 (sebelas) desa yang semakin bertambah sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD dan Renstra Perangkat Daerah Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024

Berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2024 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai lampiran dengan tabel sebagai berikut : 15

TABEL 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN
2025 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN MARANGKAYU

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)	(12)
	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
1	KECAMATAN					KECAMATAN					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Marangkayu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Marangkay u	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80		
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	230,000,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkay u	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 Dokumen	265,000,000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkay u	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50,000,000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Marangkay u	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	30,000,000	

1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Marangkay u	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		40,000,000	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	40,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Marangkay u	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	2 Dokumen	40,000,000	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Marangkay u	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		40,000,000	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	4 laporan	65,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Marangkay u	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	65,000,000	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4,396,102,700	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkay u	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12 Bulan	4,396,102,700	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
1.2.1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Orang yang mendapatkan Gaji	288 Orang / Bulan	4,241,102,700	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Marangkay	Jumlah Orang yang mendapatkan Gaji	288 Orang/bulan	4,241,102,700	

			dan Tunjangan				u	dan Tunjangan			

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)	(12)
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD	1 Laporan	50,000,000	
1.2.4	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semseter	12 Laporan	65,000,000	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semeste r	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semseteran	12 Laporan	65,000,000	
1.2.5	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Prognosis	1 Laporan	40,000,000	koordinasi dan Penyusunan Prognosis	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Prognosis	1 Laporan	40,000,000	
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	1 Laporan	122,400,000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	2 Laporan	122,400,000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang	Kecamatan Marangkayu		1 dokumen	40,000,000	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian	Kecamatan Marangkayu		1 dokumen	40,000,000	

	Milik daerah pada SKPD					Barang Milik daerah pada SKPD					
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	12 laporan	25,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	12 laporan	25,000,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Di Lakukan Penataan	1 laporan	57,400,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Di Lakukan Penataan	1 laporan	57,400,000	
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkayu	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		50,000,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkayu	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		50,000,000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
1.4.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Pakaian	45 Stel	50,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Marangkay u	Jumlah Pakaian	45 Stel	50,000,000	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkayu	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		603,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Marangkay u	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,025,000,000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)	(12)
1.5.2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Komponen Listrik	1 Paket	18,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Marangkay u	Jumlah Komponen Listrik	1 Paket	25,000,000	
1.5.3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Di Sediakan	1 Paket	50,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Marangkay u	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Di Sediakan	1 Paket	75,000,000	
1.5.4	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Peralata rumah tangga	3 Paket	75,000,000	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Kecamatan Marangkay u	Jumlah Peralata rumah tangga	3 Paket	170,000,000	
1.5.6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor		50,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kant	Kecamatan Marangkay u	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor		170,000,000	
1.5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Di Sediakan	150 Laporan	50,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Marangkay u	Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Di Sediakan	150 Laporan	50,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi Dan Kosultasi SKPD Yang Di Selenggarakan		300,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi Dan Kosultasi SKPD Yang Di Selenggarakan		400,000,000	

	Fasilitasi Kunjungan Tamu				10,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu				85,000,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah arsip yang di kelola		50,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah arsip yang di kelola		50,000,000	
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Marangkayu	Tersedianya Pengadaan Barang pada Perangkat Daerah	1 Unit	430,000,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Marangkay u	Tersedianya Pengadaan Barang pada Perangkat Daerah	1 Unit	350,000,000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
1.6.1	Pengadaan Kendaraa dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	180,000,000	Pengadaan Kendaraa dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Marangkay u	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	100,000,000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel	20 unit	100,000,000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Marangkay u	Jumlah mebel	20 unit	100,000,000	
	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan	4 unit	100,000,000	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kecamatan Marangkay u	Jumlah Peralatan	4 unit	100,000,000	
1.6.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Kecamatan Marangkayu	Jumlah sarana dan Prasarana	15 Unit	50,000,000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Marangkay u	Kecamatan Marangkayu	15 Unit	50,000,000	

1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	40 laporam	763,234,996	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	40 laporam	853,996,000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)	(12)
1.7.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,500,000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4,000,000	
1.7.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	309,996,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	309,996,000	
1.7.3	Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	450,738,996	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor/Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	540,000,000	
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Layanan	180,000,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Layanan	190,000,000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					

1.8.1	Pengadaan Mebel	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Kendaraan dinas/operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	150,000,000	Penyediaan jasa pemeliharaan Biaya Pemeliharaan,pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Kecamatan Marangkayu	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	150,000,000	
1.8.2	Pemeliharaan Peralaan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dispelihara	10 Unit	30,000,000	Pemeliharaan Peralaan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dispelihara	12 Unit	40,000,000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Marangkayu	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Marangkayu	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100		
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
2.3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Marangkayu	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	1 Kegiatan	8,016,000,000	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Marangkayu	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	2 Kegiatan	8,755,000,000	
2.3.2	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64 Laporan	8,016,000,000	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan Marangkayu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64 Laporan	8,755,000,000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Marangkayu	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang Aktif	100 Persen		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Marangkayu	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang Aktif	100 Persen		
3.1	Kegiatan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kecamatan Marangkayu	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	2 Layanan	315,000,000	Kegiatan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kecamatan Marangkayu	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	2 Kegiatan	435,000,000	

	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan Kecamatan Marangkayu pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah yang diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya.
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa.
3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada diwilayah.

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Marangkayu maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangakan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka Rencana Kerja Kecamatan Marangkayu Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun propinsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategi yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yng selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan- pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan juga merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kecamatan Marangkayu sebagai organisasi dalam memenuhi visi dan misi kecamatan telah dicapai

dalam rangka mendukung pencapaian visi dam misi pembangunan. Agar keberhasilan

Kecamatan Marangkayu dalam mencapai tujuan

trategisnya dapat diukur, maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan disertai indikator kinerja *(performance indicator)* yang terukur.

Rumusan tujuan renja Kecamatan Marangkayu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
3. Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah (Kabupaten)

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indicator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Untuk selanjutnya dirumuskan Sasaran Renja Kecamatan Marangkayu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Mrangkayu
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan
3. Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah kecamatan

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

Tabel 5

Tujuan, sasaran dan indikator Kinerja sasaran

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)
1	2	3	4

Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Kecamatan Marangkayu tahun 2025 disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kegiatan rutin kecamatan yang diusulkan dan terangkum dalam pelaksanaan musrembang tingkat kecamatan kemudian diusulkan pada musrenbang tingkat kabupaten yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Marangkayu pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Marangkayu maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai tabel berikut :

Tabel

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MARANGKAYU

TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Dana		Catatan Penting
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	6,481,780,443.00	6,481,780,443.00	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62 dokumen	62 dokumen	210,000,000.00	210,000,000.00	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	50,000,000.00	50,000,000.00	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	6 laporan	150,000,000.00	150,000,000.00	

			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	2 laporan	2 laporan	4,341,102,700.00	4,341,102,700.00	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	29 orang	29 orang	4,341,102,700..00	4,341,102,700..00	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	50,000,000.00	50,000,000.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	5 unit	5 unit	168,800,000.00	168,800,000.00	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	12 Laporan	12 laporan	128,000,000.00	128,000,000.00	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	40,800,000.00	40,800,000.00	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	Jenis	518,642,747.00	518,642,747.00	

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 jenis	5 jenis	18,000,000.00	18,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	25 jenis	25 jenis	50,000,000.00	50,000,000.00	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1210 porsi	1210 porsi	75,000,000.00	75,000,000.00	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	20.047 Lembar	20.047 Lembar	50,000,000.00	50,000,000.00	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	102 kali	150 kali	275,642,747.00	275,642,747.00	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	500 jenis	500 jenis	50,000,000.00	50,000,000.00	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	763,234,996.00	763,234,996.00	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	309,996,000.00	309,996,000.00	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	450,738,996.00	450,738,996.00	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	405,189,042.00	405,189,042.00	

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	10 Unit	10 Unit	205,197,120.00	205,197,120.00	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	199,991,922.00	199,991,922.00	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	100%	390,587,000.00	390,587,000.00	
			Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa	8 kali	8 kali	19,997,000.00	19,997,000.00	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta musrenbang	100 orang	100 orang	19,997,000.00	19,997,000.00	

			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	370,590,000.00	370,590,000.00	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	370,590,000.00	370,590,000.00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	8,390,000.000.00	9,016,600.000.00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP			74,999,000.00	74,999,000.00	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi			74,999,000.00	74,999,000.00	
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	11 Desa	11Desa	74,999,000.00	74,999,000.00	

			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	11 Desa	11 Desa	74,999,000.00	74,999,000.00	
			JUMLAH						

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana strategis Kecamatan Marangkayu Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun. . Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Marangkayu.

Rencana Kerja Kecamatan Marangkayu Tahun 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2025. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Marangkayu.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Kecamatan Marangkayu ini juga masih terdapat kekurang-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Kecamatan Marangkayu Tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

vv.RENJAKECAMATAN MUARA JAWA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan ayat (2) pasal (2) dengan jenjang perencanan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/Kota) harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)

Sementara itu paralel dengan pembuatan RKP daerah, sesuai dengan Pasal 7 Undang- undang No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Renja Perangkat daerah,yang di susun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat daerah sebagaimana di maksud dirumuskan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) dan mengacu kepada RKPD, yang memuat program, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu, b) Rumusan status kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini, c) Rumusan

peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan Renja, d) Rumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan, e) pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana, f) rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja, g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan, h) prakiraan maju pendanaan untuk tahun berikutnya, i) kejelasan siapa yang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktupenyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran. Melalu pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan kerangka berfikir yang komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.

Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan melalui a) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, b) kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur Pemerintah dan non pemerintah, c) keterwakilan yang mewadai dari seluruh segmen masyarakat terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal, d) berperan aktif pada pelaksanaan musrenbang RKPD dari segi penerapan perencanaan partisipatif, e) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan serta prioritas program.

Pendekatan politis, penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025 mengacu pada RKPD dan RPJMD yang merupakan bentuk konsekuensi politis antara Bupati/Wakil Bupati terpilih. Pendekatan ini juga tercermin pada keterlibatan aktif DPRD dalam musrenbang Kecamatan dan kabupaten termasuk hasil sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD, kemudian dokumen RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan sampai RAPBD.

Pendekatan top down, perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui rapat koordinasi dan musrenbang mulai tingkat nasional, provinsi dan kabupaten juga tujuan *globalMDGs.* Pendekatan ini tercermin pada

a) sinergi dengan program prioritas nasional dan daerah, b) konsisten pada RPJMD, RKPD dan Renstra Kecamatan Muara Jawa, Konsisten dengan dokumen RTRW daerah, c) penanganan masalah dengan pendekatan holistic dan pendekatan sistem.

Pendekatan *bottom-up,* perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dan diselaraskan melalui musrenbang, konsisten terhadap visi misi RPJMD serta kesepakatan masyarakat tentang prioritas pembangunan dan hasil forum SKPD.

Penyusunan Rencana Kerja ini disesuaikan dengan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, PengendalianDan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja ini memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kecamatan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9 Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10 Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

14 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

15 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

16 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud :

Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Muara Jawa selama tahun 2025 dengan berpedoman pada Rancangan RKPD dan Renstra Kecamatan.

Tujuan :

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Camat Muara Jawa dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan.

Pada dasarnya rencana kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Muara Jawa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan adalah pengkuruan dalam bentuk indeks berskala 1
s.d 10 yang merupakan rata-rata kumulatif capaian indikator pada 10 (Sepuluh) sasaran strategis pada persepektif pemangku kepentingan. Semakin tinggi nilai tingkat keberhasilan, menunjukkan bahwa semakin baik kinerja KLJ secara keseluruhan perspektif pemangku kepentingan.

Adapun target atas Indikator Keberhasilan atau IKU (Indikator Kinerja Utama) ini pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	55	60	65	70	75
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	82.35	83	84	84	85
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Persen	15	20	N/A	N/A	N/A

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di

tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Muara Jawa telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya dan telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu:

a. Menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Awal Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, mulai dari proses musrenbang tingkat Kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan, forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.
b. Menyusun Rencana Kerja Awal Perangkat Daerah Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2023 terhadap capaian Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Muara Jawa sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2023 terhadap target di Tahun 2024. Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Muara Jawa Tahun 2021- 2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra Kecamatan Muara Jawa 2021-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut T.C-29:

NAMA PD : KECAMATAN

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD tahun berjalan (2024)	
										Target Renja-PD tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(5+6+8)	12=(11/4)
					URUSAN : KECAMATAN										
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	95	80	100	80	40	50		220	231,58
						Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	87,5	75	85,71	87,5	100	114,29		87,5	100,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	100	0	0	0	0	0		0	0,00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	0	0	0	0	0		0	0,00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	0	0	0	0	0	0		0	0,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	3	0	0	0	0	0		0	0,00
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	0	0	0	0	0	0		0	0,00

NAMA PD : KECAMATAN MUARA JAWA

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD tahun berjalan (2024)	
										Target Renja-PD tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(5+6+8)	12=(11/4)
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	36	0	0	9	0	0		0	0,00
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0	0	0	0	0	0		0	0,00
7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	0	0	0	0	0	0		0	0,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	439	86	100	2	2	100		188	42,82
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah perizinan non usaha yang dikeluarkan Kecamatan	0	0	0	0	0	0		0	0,00
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	25000	5000	100	5000	2000	40		7100	28,40
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	426	86	86	63	63	100		235	55,16
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	100	100	100	100	100		300	300,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	480	84	100	84	84	100		268	55,83
7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2600	520	100	520	520	100		1140	43,85

NAMA PD : KECAMATAN MUARA JAWA

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD tahun berjalan (2024)	
										Target Renja-PD tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(5+6+8)	12=(11/4)
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun	230	46	100	46	23	50		169	73,48
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek dan Pelatihan di Desa/Kelurahan	1410	282	100	282	150	53,19148936		532	37,73
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Desa / Kelurahan yang Mengikuti Lomba	40	8	100	8	8	100		116	290,00
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	348	348	100	348	348	100		796	228,74
7	01	03	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	348	348	100	348	174	50		622	178,74
					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta	80	16	16	16	0	0		32	40,00
					Penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah sarana/prasarana	320	64	100	0	0	0		164	51,25
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100	100	100	100	100	100		300	300,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20	0	0	0	0	0		0	0,00

NAMA PD : KECAMATAN MUARA JAWA

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD tahun berjalan (2024)	
										Target Renja-PD tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(5+6+8)	12=(11/4)
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	0	0	0	0	0	0		0	0,00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat	0	0	0	0	0	0		0	0,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	0	0	0	0	0	0		0	0,00
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan koordinasi dengan perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	0	0	0	0	0		0	0,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	83,33	100	100	100	100		283,33	283,33
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	44	0	100	2	2	100		102	231,82

NAMA PD : KECAMATAN MUARA JAWA

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD tahun berjalan (2024)	
										Target Renja-PD tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(5+6+8)	12=(11/4)
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	N/A	0	0	0	0	0		0	0,00
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Yang Difasilitasi	N/A	0	0	0	0	0		0	0,00
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	N/A	0	0	0	0	0		0	0,00
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	20	0	100	5	5	100		105	525,00
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Fasiltasi	N/A	0	0	0	0	0		0	0,00
7	01	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	N/A	0	0	0	0	0		0	0,00
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah	N/A	0	0	0	0	0		0	0,00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24	0	4	4	3	75		7	29,17

NAMA PD : KECAMATAN MUARA JAWA

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD tahun berjalan (2024)	
										Target Renja-PD tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(5+6+8)	12=(11/4)
					URUSAN : NON URUSAN										
X	XX	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67 (B)	61 (B)	69,2 (B)	62 (B)	69,2 (B)	69,2 (B)		64 (B)	62 (B)
X	XX	01.	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107	20	100	34	34	100		154	143,93
X	XX	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	2	100	2	1	50		103	1030,00
X	XX	01.	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	0	0	0	0	0	0		0	0,00
X	XX	01.	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	0	0	0	0	0	0		0	0,00
X	XX	01.	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90	18	100	2	1	50,00		119	132,22
X	XX	01.	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0		0	0,00
X	XX	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	56	18	100	14	14	100		132	235,71
X	XX	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	5160	1032	1032	1032	444	43,02325581		2508	48,60
X	XX	01.	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	0	0	0	0		0	0,00
X	XX	01.	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0	0	0	0		0	0,00

NAMA PD : KECAMATAN MUARA JAWA

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD tahun berjalan (2024)	
										Target Renja-PD tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(5+6+8)	12=(11/4)
X	XX	01.	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	0	0	0	0	0	0		0	0,00
X	XX	01.	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1	100	1	1	100		102	2040,00
X	XX	01.	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4	0	100	2	2	100		102	2550,00
X	XX	01.	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	85	17	100	17	9	52,94117647		126	148,24
X	XX	01.	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0		0	0			0	0,00
X	XX	01.	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah BMD yang dikelola	1017	1017	100	1017	1017	100		2134	209,83
X	XX	01.	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0	0	0	0		0	0,00
X	XX	01.	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	1017	1017	100	1017	1017	100		2134	209,83
X	XX	01.	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dinilai	0	0	0	0	0	0		0	0,00
X	XX	01.	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	0	0	0	0	0	0		0	0,00
X	XX	01.	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	0	0	0	0	0	0		0	0,00

NAMA PD : KECAMATAN MUARA JAWA

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD tahun berjalan (2024)	
										Target Renja-PD tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(5+6+8)	12=(11/4)
X	XX	01.	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	1017	1017	100	1017	1017	100		2134	209,83
X	XX	01.	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dimanfaatkan	0	0	0	0	0	0		0	0,00
X	XX	01.	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian	86	86	100	86	86	100		272	316,28
X	XX	01.	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang mendapatkan peningkatan	5	1	100	1	0	0		101	2020,00
X	XX	01.	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	545	109	100	0	0	0		209	38,35
X	XX	01.	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0		0	0			0	0,00
X	XX	01.	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	0	0		0	0			0	0,00
X	XX	01.	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai selama 12 bulan	0	0		0	0			0	0,00
X	XX	01.	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Yang Pensiun	0	0		0	0			0	0,00
X	XX	01.	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pegawai Meninggal Yang Dipulangkan	0	0		0	0			0	0,00
X	XX	01.	2.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN pindah Tugas	0	0		0	0			0	0,00
X	XX	01.	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50	10	100	10	0	0		110	220,00
X	XX	01.	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	700	140	100	90	0	0		240	34,29
X	XX	01.	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	20	100	10	0	0		120	120,00

NAMA PD : KECAMATAN MUARA JAWA

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD tahun berjalan (2024)	
										Target Renja-PD tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(5+6+8)	12=(11/4)
X	XX	01.	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	64	11	100	11	11	100		122	190,63
X	XX	01.	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	340	68	100	68	34	50		202	59,41
X	XX	01.	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1450	290	100	290	145	50		535	36,90
X	XX	01.	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	25	5	100	5	2,5	50		107,5	430,00
X	XX	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	50	10	100	10	5	50		115	230,00
X	XX	01.	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	840060	168.012	100	168.012	84006	50		252118	30,01
X	XX	01.	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5	1	100	1	0	0		101	2020,00
X	XX	01.	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	25	5	100	5	0	0		105	420,00
X	XX	01.	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitas	20	4	100	4	2	50		106	530,00
X	XX	01.	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	2110	422	100	422	300	71,09004739		822	38,96

NAMA PD : KECAMATAN MUARA JAWA

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD tahun berjalan (2024)	
										Target Renja-PD tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(5+6+8)	12=(11/4)
X	XX	01.	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	5000	1000	100	1000	500	50		1600	32,00
X	XX	01.	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang mendapatkan dukungan pelaksanaan	5	1	100	1	0	0		101	2020,00
X	XX	01.	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	400	80	100	4	85	2125		265	66,25
X	XX	01.	2,07	05	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	6	1	100	1	1	100		102	1700,00
X	XX	01.	2,07	05	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang diadakan	40	8	100	0	0	0		108	270,00
X	XX	01.	2,07	07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	JumlahPeralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	20	66	100	0	0	0		166	830,00
X	XX	01.	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diadakan	10	2	100	3	0	0		102	1020,00
X	XX	01.	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	0	0	0	0	0	0		0	0,00
X	XX	01.	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	0	0	0	0	0	0		0	0,00
X	XX	01.	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	12	100	12	12	100		124	1033,33

NAMA PD : KECAMATAN MUARA JAWA

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD tahun berjalan (2024)	
										Target Renja-PD tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(5+6+8)	12=(11/4)
X	XX	01.	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	60	12	12	12	7	58,33333333		31	51,67
X	XX	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	12	12	12	7	58,33333333		31	51,67
X	XX	01.	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	0		0	0,00
X	XX	01.	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	12	12	12	6	50		30	50,00
X	XX	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diperlihara	973	177	100	177	177	100		454	46,66
X	XX	01.	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	0	0	0	0	0	0		0	0,00
X	XX	01.	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	110	22	22	22	10	45,45454545		54	49,09
X	XX	01.	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang mendapatkan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan	5	1	1	1	1	100		3	60,00
X	XX	01.	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan	0	0	0	0	0	0		0	0,00

NAMA PD : KECAMATAN MUARA JAWA

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD tahun berjalan (2024)	
										Target Renja-PD tahun 2024	Realisasi Renja-PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(5+6+8)	12=(11/4)
X	XX	01.	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	0	0	0	0	0	0		0	0,00
X	XX	01.	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	475	95	100	97	50	51,54639175		245	51,58
X	XX	01.	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	250	50	100	50	0	0		150	60,00
X	XX	01.	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	0	0	0	0	0	0		0	0,00
X	XX	01.	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	40	8	100	4	0	0		108	270,00
X	XX	01.	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	0	0	0	0	0	0		0	0,00
X	XX	01.	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	0	0	0	0	0	0		0	0,00

Dari tabel T.C-29 tersebut dapat dilihat bahwa terdapat program dan kegiatan yang melebihi target, terdapat beberapa program dan kegiatan yang memenuhi target dan beberapa program dan kegiatan yang tidak memenuhi target. Adapun program dan kegiatan yang tidak memenuhi target disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

1. Perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Nilai pagu pada APBD lebih kecil dari nilai pada Renja.

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam mengatasi hal-hal tersebut adalah:

1. Melakukan pergeseran anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan.
2. Mengurangi dan menghapus beberapa sub kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Sebagaimana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kecamatan Muara Jawa sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenengan Bupati kepada Camat dilakukan pengukuran kinerja sesuaidengan Renstra Kecamatan Muara Jawa Tahun 2021-2026 yaitu Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Capaian indikator kinerja Nilai SKM Kecamatan Muara Jawa tahun 2023 89,73% melebihi target 82,00 %. Ketercapaian kinerja ini sesuai dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan guna mendukung kinerja dimaksud.

Mendasari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan

kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kecamatan Muara Jawa sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan Renstra Kecamatan Muara Jawa Tahun 2021-2026 yaitu Nilai SAKIP.

Capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Muara Jawa pada tahun 2022 ditetapkan sebesar 69,2 melebihi target 62. Ketercapaian kinerja ini sesuai dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan guna mendukung kinerja dimaksud.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai kartanegra Nomor 247/SK- BUP/HK/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Camat dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat; Dalam Keputusan tersebut camat melaksanakan 9 Keputusan yang termuat dalam Surat Keputusan tersebut dan pelaksanaannya Kecamatan Muara Jawa melakukan jenis *PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN serta melaporkan kegiatan setiap bulannya sesuai lampiran Surat Keputusan tersebut.*

Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamata Jawa cukup memuaskan , terdapat 5 (Lima) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Muara Jawa, yaitu :

a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
b. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP;
c. Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan;
d. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang aktif;
e. Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Muara Jawa berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan minimal, dimana indikator disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan Muara Jawa sebagaimana uraian tugas camat diatas. Pencapaian kinerja Kecamatan Muara Jawa, *tabel T.C-30* berikut ini:

TABEL T.C-30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MUARA JAWA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	SPM/Standar Nasion	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
I	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:												
	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan			61	62	64	65	67	69,2	69,2	69,5	70	
	Indikator Sasaran (IKU perangkat daerah):												
	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			55	60	65	70	75	55	100	100	100	
	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			82,35	83	84	84	85	100	100	100	100	
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan			15	20	25	30	35	0	0	0	0	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 40 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan bangunan gedung, penerbitan ijin secara online melalui apliaksi simbg.pu.go.id sehingga tidak ada lagi penerbitan IMB dan pemungutan retribusinya di Kecamatan
II	INDIKATOR PROGRAM:												
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			61	62	64	65	67	69,2	69,2	69,5	70	
	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP			80	80	85	85	95	80	80	85	85	
	Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan			75	87,5	87,5	87,5	87,5	100	100	100	100	
	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang aktif			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			83,33	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Muara Jawa dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Muara Jawa.

a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Muara Jawa sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Jawa .

3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD. Tantangan :

a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (Software dan hardware) sehingga mempengarui kelancaran proses pelayanan ;
b. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan ;
c. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik ;

Peluang :

a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada ;
b. Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan ;
c. Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran Pelayanan Paten Kecamatan Muara Jawa ;
d. Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Muara Jawa terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :

a. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga. Kecamatan Muara Jawa mengharapkan kepada Pemerintah agar terus melakukan pembinaan – pembinaan serta kompetisi dalam rangka memacu tumbuhnya bibit – bibit atlit yang berkualitas , sehingga mampu menambah kejuaraan dari tahun ke tahun, serta harus pula memberikan perhatian lebih kepada para pemuda berprestasi.
b. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Pada tahun anggaran 2024, OPD Kecamatan Muara Jawa, melalui Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan melakukan penertiban, pembinaan, pemantau sehingga wilayah Kecamatan Muara Jawa dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan porsonil, dan sarana prasaran yang mendukung.

Isu penting lainnya yang ada di Kecamatan Muara Jawa semenjak tahun 2023 dan berlanjut pada tahun 2024 adalah wacana bahwa Kecamatan Muara Jawa akan menjadi bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 9 Tahun 2023 Tanggal 19 Juni 2023. Hal ini tentu saja membutuhkan banyak penyesuaian rencana kerja guna mempersiapkan Kecamatan Muara Jawa sebagai bagian dari Ibu Kota Nusantara. Hal-hal yang sangat dibutuhkan untuk adalah:

1. Kemantapan sarana dan prasarana guna memperlancar proses mobilitas manusia dan barang serta arus pertumbuhan ekonomi.
2. Kesiapan sumber daya alam dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.
3. Kesiapan penduduk Kecamatan Muara Jawa untuk meningkatkan kompetensinya agar mampu mengisi lowongan-lowongan pekerjaan yang timbul dengan adanya pembangunan Kawasan Ibu Kota Nusantara, serta agar tidak kalah saing dengan tenaga kerja yang banyak didatangkan dari luar Klaimantan Timur.
4. Kesiapan ASN Kecamatan Muara Jawa untuk mengimbangi

perubahan- perubahan dinamis dalam lingkup pekerjaan yang standarnya akan semakin naik menyesuaikan dengan standar kinerja ASN dari pusat, serta dinamisnya lingkup tigas dan fungsi yang dihadapi.

5. Kesiapan aparat keamanan dalam menangani dampat buruk baik keamanan, soial, budaya, serta RAS dari banyaknya proses perpindahan penduduk ke area Ibu Kota Nusantara dan wilayah-wilayah terdekat termasuk Kecamatan Muara Jawa.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD Kecamatan Muara Jawa adalah perbandingan antara program/kegiatan yang tertuang ke dalam rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan SKPD atau adanya perubahan program kegiatan yang tidak sesuai dengan tupoksi SKPD. Review secara rinci dapat disampaikan sebagaimana dalam Tabel T.C-31 berikut ini :

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	RANCANGAN AKHIR RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN 2025						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	KECAMATAN MUARA JAWA & 8 KELURAHAN	Kecamatan Muara Jawa				59.061.311.962,00	KECAMATAN MUARA JAWA & 8 KELURAHAN	Kecamatan Muara Jawa				59.061.311.962,00	
	KECAMATAN MUARA JAWA	Kecamatan Muara Jawa				44.599.971.962,00	KECAMATAN MUARA JAWA	Kecamatan Muara Jawa				44.599.971.962,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Muara Jawa	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	Nilai	25.005.620.460,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Muara Jawa	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	Nilai	25.005.620.460,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36	Dokumen	605.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36	Dokumen	605.000.000,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	140.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	140.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen RENSTRA	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Muara Jawa	1	Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan Dokumen RENSTRA	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Muara Jawa	1	Dokumen	100.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Renja	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Muara Jawa	1	Dokumen	30.000.000,00	Penyusunan Dokumen Renja	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Muara Jawa	1	Dokumen	30.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Renja - P	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Muara Jawa	1	Dokumen	10.000.000,00	Penyusunan Dokumen Renja - P	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Muara Jawa	1	Dokumen	10.000.000,00	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000,00	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000,00	
	PKoordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000,00	PKoordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000,00	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Dokumen	70.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Dokumen	70.000.000,00	
	Pelaporan Manajemen resiko,Evaluasi Kinerja Triwulan (E-Pantau) dan penyusunan LKJIP	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Dokumen	70.000.000,00	Pelaporan Manajemen resiko,Evaluasi Kinerja Triwulan (E-Pantau) dan penyusunan LKJIP	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Dokumen	70.000.000,00	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	60.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	60.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	60.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	60.000.000,00	
7.01.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200	Data	300.000.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200	Data	300.000.000,00	

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	RANCANGAN AKHIR RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN 2025						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200	Data	300.000.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200	Data	300.000.000,00	
7.01.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	Berita Acara	25.000.000,00	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	Berita Acara	25.000.000,00	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	Berita Acara	25.000.000,00	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	Berita Acara	25.000.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	14	Laporan	17.588.892.456,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	14	Laporan	17.588.892.456,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	924	Orang/bulan	17.059.852.456,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	924	Orang/bulan	17.059.852.456,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Muara Jawa	924	Orang/bulan	17.059.852.456,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Muara Jawa	924	Orang/bulan	17.059.852.456,00	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	25.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	25.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Muara Jawa	1	Laporan	25.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Muara Jawa	1	Laporan	25.000.000,00	
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	kali	-	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Kec. Muara Jawa	2	Dokumen	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Kec. Muara Jawa	2	Dokumen	-	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	Laporan	479.040.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	Laporan	479.040.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kec. Muara Jawa	14	Laporan	479.040.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kec. Muara Jawa	14	Laporan	479.040.000,00	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	25.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	25.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	25.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	25.000.000,00	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	1017	Unit	280.200.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Terlaksananya pengadministrasian Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	1017	Unit	280.200.000,00	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	25.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	25.000.000,00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	25.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	25.000.000,00	

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	150.000.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	150.000.000,00	

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	RANCANGAN AKHIR RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN 2025						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	150.000.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	150.000.000,00	
7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	50.000.000,00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	50.000.000,00	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	50.000.000,00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	50.000.000,00	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	55.200.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	55.200.000,00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	55.200.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	55.200.000,00	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Muara Jawa	0	Laporan	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Muara Jawa	0	Laporan	-	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Muara Jawa	0	Laporan	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Muara Jawa	0	Laporan	-	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	170	Orang	705.511.992,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Terlaksananya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian kepada pegawai	170	Orang	705.511.992,00	
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	Unit	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	Unit	-	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	Unit	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	Unit	-	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	156	Paket	162.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	156	Paket	162.000.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Bagi Pegawai Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	156	Paket	162.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Bagi Pegawai Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	156	Paket	162.000.000,00	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang	200.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang	200.000.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kecamatan Muara Jawa Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kec. Muara Jawa	20	Orang	200.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kecamatan Muara Jawa Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kec. Muara Jawa	20	Orang	200.000.000,00	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120	Orang	143.511.992,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120	Orang	143.511.992,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120	Orang	143.511.992,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120	Orang	143.511.992,00	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	Orang	200.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	Orang	200.000.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	Orang	200.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	Orang	200.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	11	Layanan	1.085.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11	Layanan	1.085.000.000,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	50.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	50.000.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	50.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	50.000.000,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	150.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	150.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	150.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	150.000.000,00	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	25.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	25.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	25.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	25.000.000,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	300.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	300.000.000,00	

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	300.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	300.000.000,00	

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	RANCANGAN AKHIR RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN 2025						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	50.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	50.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	50.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	50.000.000,00	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	Dokumen	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	Dokumen	-	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	-	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	25.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	25.000.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material Kantor Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	25.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material Kantor Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	25.000.000,00	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	30.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	30.000.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	30.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	30.000.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	426	Laporan	350.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	426	Laporan	350.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	426	Laporan	350.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	426	Laporan	350.000.000,00	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5000	Dokumen	70.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5000	Dokumen	70.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5000	Dokumen	70.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5000	Dokumen	70.000.000,00	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	35.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	35.000.000,00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	35.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	35.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	30	Unit	568.380.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	30	Unit	568.380.000,00	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Muara Jawa	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	0	Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Muara Jawa	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	0	Unit	-	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Muara Jawa	Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	180.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Muara Jawa	Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	180.000.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	180.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	180.000.000,00	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	Unit	90.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	Unit	90.000.000,00	
	Pengadaan Mebel Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	Unit	90.000.000,00	Pengadaan Mebel Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	Unit	90.000.000,00	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	Unit	98.380.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	Unit	98.380.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	Unit	98.380.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	Unit	98.380.000,00	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	200.000.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	200.000.000,00	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	200.000.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	200.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	3.117.636.012,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	3.117.636.012,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	50.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	50.000.000,00	

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	RANCANGAN AKHIR RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN 2025						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	1.100.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	1.100.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	1.100.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	1.100.000.000,00	Pagu anggaran kurang, sesuai hasil rekon anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.1.458.918.129,-
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.967.636.012,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.967.636.012,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.967.636.012,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.967.636.012,00	Pagu anggaran kurang. Sesuai hasil rekon, anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.2.453.625.456,-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	114	Unit	1.055.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	114	Unit	1.055.000.000,00	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	50.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	50.000.000,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	Unit	390.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	Unit	390.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	Unit	390.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	Unit	390.000.000,00	
7.01.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1	Unit	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1	Unit	50.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1	Unit	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1	Unit	50.000.000,00	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	Unit	-	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	Unit	-	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	65.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	65.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	65.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	65.000.000,00	
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	300.000.000,00	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	300.000.000,00	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	300.000.000,00	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	300.000.000,00	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	200.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	200.000.000,00	
	Pemeliharaan Gedung Kantor Camat Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	100.000.000,00	Pemeliharaan Gedung Kantor Camat Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	100.000.000,00	
	Pemeliharaan Rumah Jabatan Camat Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	100.000.000,00	Pemeliharaan Rumah Jabatan Camat Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	100.000.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Muara Jawa	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	85	Persen	1.919.650.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Muara Jawa	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	85	Persen	1.919.650.000,00	
			Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	100	Persen	10.600.000.000,00			Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	100	Persen	10.600.000.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	Kegiatan	450.000.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	Kegiatan	450.000.000,00	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	Laporan	150.000.000,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	Laporan	150.000.000,00	
	Fasilitasi Kegiatan Erau Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	100.000.000,00	Fasilitasi Kegiatan Erau Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	100.000.000,00	

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	RANCANGAN AKHIR RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN 2025						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	
	Fasilitasi Stunting (Rembuk dan Operasional TPPS) Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	50.000.000,00	Fasilitasi Stunting (Rembuk dan Operasional TPPS) Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	50.000.000,00	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Dokumen	300.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Dokumen	300.000.000,00	
	Fasilitasi HUT RI Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	300.000.000,00	Fasilitasi HUT RI Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	300.000.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2	Kegiatan	12.069.650.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Muara Jawa	Terlaksananya kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2	Kegiatan	12.069.650.000,00	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	543	Laporan	1.469.650.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	543	Laporan	1.469.650.000,00	
	Pengelolaan persampahan Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan	1	Laporan	800.000.000,00	Pengelolaan persampahan Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan	1	Laporan	800.000.000,00	
	Pemeliharaan sarana dan prasarana Lampu Penerangan Jalan Umum 8 Kelurahan di Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Unit	529	Unit	449.650.000,00	Pemeliharaan sarana dan prasarana Lampu Penerangan Jalan Umum 8 Kelurahan di Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Unit	529	Unit	449.650.000,00	
	Fasilitasi PATEN Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan	12	Laporan	70.000.000,00	Fasilitasi PATEN Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan	12	Laporan	70.000.000,00	
	Penanganan Darurat Bencana	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan	1	Laporan	150.000.000,00	Penanganan Darurat Bencana	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan	1	Laporan	150.000.000,00	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	24	Laporan	10.600.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	24	Laporan	10.600.000.000,00	
	Lanjutan Pembuatan Parit Padat Karya RT. 18 Kelurahan Muara Jawa Ulu	Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	Lanjutan Pembuatan Parit Padat Karya RT. 18 Kelurahan Muara Jawa Ulu	Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	Musrenbang ID Usulan 1405225 Catatan Kepala Perangkat Daerah : Prioritas Nomor 3
	Pembangunan Jalan Jalan Kuburan Muslimin RT.07 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	Pembangunan Jalan Jalan Kuburan Muslimin RT.07 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	Musrenbang ID Usulan 1423983 Catatan Kepala Perangkat Daerah : Prioritas Nomor 2
	Semenisasi Gang Saudara RT 13 Kelurahan Dondang	Dondang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	Semenisasi Gang Saudara RT 13 Kelurahan Dondang	Dondang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	Musrenbang ID Usulan 1383000 Catatan Kepala Perangkat Daerah : Prioritas Nomor 6
	Peningkatan badan jalan Hibrida Kelurahan Muara Jawa Ilir	Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	Peningkatan badan jalan Hibrida Kelurahan Muara Jawa Ilir	Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	Musrenbang ID Usulan 1410413 Catatan Kepala Perangkat Daerah : Prioritas Nomor 1
	Pengaspalan Jalan Karya RT.03 Kelurahan Teluk Dalam	Teluk Dalam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	Pengaspalan Jalan Karya RT.03 Kelurahan Teluk Dalam	Teluk Dalam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	Musrenbang ID Usulan 1425706 Catatan Kepala Perangkat Daerah : Prioritas Nomor 5
	Peningkatan Badan Jalan Gang Alqodiri RT.08 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	Peningkatan Badan Jalan Gang Alqodiri RT.08 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	Musrenbang ID Usulan 1404017 Catatan Kepala Perangkat Daerah : Prioritas Nomor 4
	Lanjutan Peningkatan Jalan Jalan Lapana RT. 7 Kel. Dondang Kecamatan Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara (Pkr_zais)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	700.000.000,00	Lanjutan Peningkatan Jalan Jalan Lapana RT. 7 Kel. Dondang Kecamatan Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara (Pkr_zais)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	700.000.000,00	AKHMAD ZAIS. H,R,H
	Lanjutan Peningktan Jalan Tembus Gang Kelapa Kel. Dondang Kecamatan Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara (Pkr_zais)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	700.000.000,00	Lanjutan Peningktan Jalan Tembus Gang Kelapa Kel. Dondang Kecamatan Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara (Pkr_zais)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	700.000.000,00	AKHMAD ZAIS. H,R,H
	Lanjutan Jembatan Nelayan RT. 8 Kel. Dondang Kecamatan Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara (Pkr_zais)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	600.000.000,00	Lanjutan Jembatan Nelayan RT. 8 Kel. Dondang Kecamatan Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara (Pkr_zais)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	600.000.000,00	AKHMAD ZAIS. H,R,H
	Lanjutan Jembatan Nelayan RT. 04 Kel. Dondang Kecamatan Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara (Pkr_zais)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	600.000.000,00	Lanjutan Jembatan Nelayan RT. 04 Kel. Dondang Kecamatan Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara (Pkr_zais)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	600.000.000,00	AKHMAD ZAIS. H,R,H
	Normalisasi Drainase RT. 10 dan RT. 9 Kel. Dondang Kecamatan Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara (Pkr_zais)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	Normalisasi Drainase RT. 10 dan RT. 9 Kel. Dondang Kecamatan Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara (Pkr_zais)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	AKHMAD ZAIS. H,R,H
	Normalisasi Drainase RT. 014 Kel. Dondang Kecamatan Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara (Pkr_zais)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	Normalisasi Drainase RT. 014 Kel. Dondang Kecamatan Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara (Pkr_zais)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	AKHMAD ZAIS. H,R,H

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	RANCANGAN AKHIR RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN 2025						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	
	Peningkatan Jalan Musantara Kel. Tama Pole Kecamatan Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara (Pkr_zais)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	1.000.000.000,00	Peningkatan Jalan Musantara Kel. Tama Pole Kecamatan Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara (Pkr_zais)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	1.000.000.000,00	AKHMAD ZAIS. H,R,H
	pembuatan jalan baru handil petinggi Rt 14 Kel. muara kembang Kec. muara jawa (Pkr_muh)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	1.200.000.000,00	pembuatan jalan baru handil petinggi Rt 14 Kel. muara kembang Kec. muara jawa (Pkr_muh)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	1.200.000.000,00	MUH SHALEH
	peningkatan jalan sidang Gg sawo Kel. Muara jawa ilir Kec. muara jawa (Pkr_muh)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	400.000.000,00	peningkatan jalan sidang Gg sawo Kel. Muara jawa ilir Kec. muara jawa (Pkr_muh)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	400.000.000,00	MUH SHALEH
	normalisasi parit handil 8 Rt.3 Kel. Muara jawa ilir Kec. muara jawa (Pkr_muh)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	normalisasi parit handil 8 Rt.3 Kel. Muara jawa ilir Kec. muara jawa (Pkr_muh)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	MUH SHALEH
	Normalisasi parit besar handil 8 Rt. 11 Kel. Muara jawa ilir Kec. muara jawa (Pkr_muh)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	Normalisasi parit besar handil 8 Rt. 11 Kel. Muara jawa ilir Kec. muara jawa (Pkr_muh)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	MUH SHALEH
	Peningkatan jalan gg onthel Rt 28 kel.Muara Jawa Pesisir kec.Muara Jawa jalan gg onthel Rt 28 kel.Muara Jawa Pesisir kec.Muara Jawa (Pkr_sab)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	500.000.000,00	Peningkatan jalan gg onthel Rt 28 kel.Muara Jawa Pesisir kec.Muara Jawa jalan gg onthel Rt 28 kel.Muara Jawa Pesisir kec.Muara Jawa (Pkr_sab)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	500.000.000,00	SA"BIR
	peningkatan jalan gg. jasa bhakti Rt 04 kel.Muara Jawa Pesisir kec.Muara Jawa (Pkr_sab)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	1.000.000.000,00	peningkatan jalan gg. jasa bhakti Rt 04 kel.Muara Jawa Pesisir kec.Muara Jawa (Pkr_sab)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	1.000.000.000,00	SA"BIR
	Pembuatan drainase Gg. LANGGAR Rt 05 kel.Muara Jawa Pesisir MUARA JAWA (Pkr_sab)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	300.000.000,00	Pembuatan drainase Gg. LANGGAR Rt 05 kel.Muara Jawa Pesisir MUARA JAWA (Pkr_sab)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	300.000.000,00	SA"BIR
	Pembuatan jembatan deck beton Gg. josch Rt 09 kel.Muara Jawa Pesisir MUARA JAWA (Pkr_sab)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	Pembuatan jembatan deck beton Gg. josch Rt 09 kel.Muara Jawa Pesisir MUARA JAWA (Pkr_sab)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	200.000.000,00	SA"BIR
	Pembuatan jembatan ulin blok tepian 3 jln Tahir Rt 08 kel.Muara Jawa Pesisir MUARA JAWA (Pkr_sab)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	400.000.000,00	Pembuatan jembatan ulin blok tepian 3 jln Tahir Rt 08 kel.Muara Jawa Pesisir MUARA JAWA (Pkr_sab)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	400.000.000,00	SA"BIR
	Semenisasi Gg. SAHABAT Rt 13 kel.Muara Jawa Pesisir MUARA JAWA (Pkr_sab)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	500.000.000,00	Semenisasi Gg. SAHABAT Rt 13 kel.Muara Jawa Pesisir MUARA JAWA (Pkr_sab)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	500.000.000,00	SA"BIR
	Peningkatan badan jalan Gg. PADAIDI Rt 03 Muara Jawa Pesisir MUARA JAWA (Pkr_sab)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	500.000.000,00	Peningkatan badan jalan Gg. PADAIDI Rt 03 Muara Jawa Pesisir MUARA JAWA (Pkr_sab)	Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	500.000.000,00	SA"BIR
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Muara Jawa	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	Persen	6.767.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Muara Jawa	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	Persen	6.767.000.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	2	Kegiatan	110.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	2	Kegiatan	110.000.000,00	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	176	Lembaga masyarakat	60.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	176	Lembaga masyarakat	60.000.000,00	
	Fasilitasi Musrenbang Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	176	Lembaga masyarakat	60.000.000,00	Fasilitasi Musrenbang Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	176	Lembaga masyarakat	60.000.000,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	Unit	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	Unit	-	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	Pokmas/Ormas	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	Pokmas/Ormas	-	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2	Laporan	50.000.000,00	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2	Laporan	50.000.000,00	
	Fasilitasi Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan	1	Laporan	25.000.000,00	Fasilitasi Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan	1	Laporan	25.000.000,00	Pagu anggaran kurang. Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten adalah Rp.150.000.000,-
	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan	1	Laporan	25.000.000,00	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan	1	Laporan	25.000.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	236	Lembaga Kemasyarakatan	6.657.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	236	Lembaga Kemasyarakatan	6.657.000.000,00	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	400	Lembaga Kemasyarakatan	6.457.000.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	400	Lembaga Kemasyarakatan	6.457.000.000,00	
	Fasilitasi pelaksanaan HKG PKK Kecamatan Muara Jawa Tingkat Kabupaten	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lembaga	150.000.000,00	Fasilitasi pelaksanaan HKG PKK Kecamatan Muara Jawa Tingkat Kabupaten	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lembaga	150.000.000,00	
	Operasional PKK Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lembaga	100.000.000,00	Operasional PKK Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lembaga	100.000.000,00	
	Fasilitasi Forum Anak Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lembaga	20.000.000,00	Fasilitasi Forum Anak Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lembaga	20.000.000,00	
	Honorarium Pengurus RT Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	148	Lembaga	3.463.200.000,00	Honorarium Pengurus RT Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	148	Lembaga	3.463.200.000,00	
	Honor LPM Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga	377.600.000,00	Honor LPM Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga	377.600.000,00	

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	RANCANGAN AKHIR RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN 2025						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	
	Honorarium Lembaga Adat Kelurahan Se-Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga	420.800.000,00	Honorarium Lembaga Adat Kelurahan Se-Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga	420.800.000,00	Pagu anggaran untuk honorarium lembaga adat kelurahan selama 12 bulan kurang, yang dibutuhkan adalah Rp.753.600.000,-
	Operasional karang taruna Se-Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga	80.000.000,00	Operasional karang taruna Se-Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga	80.000.000,00	
	Honor Linmas Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	111	Orang	666.000.000,00	Honor Linmas Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	111	Orang	666.000.000,00	
	Fasilitasi Posyandu (Operasional Posyandu) Se-Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	55	Posyandu	224.400.000,00	Fasilitasi Posyandu (Operasional Posyandu) Se-Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	55	Posyandu	224.400.000,00	
	Fasilitasi Lomba Posyandu Tingkat Kecamatan dan kabupaten	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2	Kegiatan	50.000.000,00	Fasilitasi Lomba Posyandu Tingkat Kecamatan dan kabupaten	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2	Kegiatan	50.000.000,00	Pagu anggaran kurang. Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten adalah Rp.150.000.000,-
	Honor Kader Posyandu se-Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	275	Orang	825.000.000,00	Honor Kader Posyandu se-Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	275	Orang	825.000.000,00	
	Operasional Pokjanal Posyandu Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lembaga	50.000.000,00	Operasional Pokjanal Posyandu Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lembaga	50.000.000,00	
	Jambore PAUD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lembaga	30.000.000,00	Jambore PAUD Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lembaga	30.000.000,00	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Lembaga Kemasyarakatan	200.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Lembaga Kemasyarakatan	200.000.000,00	
	Fasilitasi Pramuka Kwaran Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	Fasilitasi Pramuka Kwaran Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	
	Pengadaan tiang dan umbul-umbul Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyarakatan	175.000.000,00	Pengadaan tiang dan umbul-umbul Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyarakatan	175.000.000,00	
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Disediakan	0	Unit	-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Disediakan	0	Unit	-	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Muara Jawa	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100	Persen	175.000.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Muara Jawa	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100	Persen	175.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	Kegiatan	175.000.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	Kegiatan	175.000.000,00	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat	4	Kegiatan	175.000.000,00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat	4	Laporan	175.000.000,00	
	Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah kegiatan	3	Kegiatan	75.000.000,00	Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah kegiatan	3	Kegiatan	75.000.000,00	
	Safari Ramadahan di Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah kegiatan	1	Kegiatan	100.000.000,00	Safari Ramadahan di Kecamatan Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah kegiatan	1	Kegiatan	100.000.000,00	Pagu anggaran kurang, biaya yang dibutuhkan adalah Rp.150.000.000,- (makan minum kegiatan dan bingkisan Safari Ramadhan di 8 kelurahan, Safari Ramadhan Tk. Kecamatan)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Muara Jawa	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	132.701.502,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Muara Jawa	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	132.701.502,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	11	Kegiatan	132.701.502,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	11	Kegiatan	132.701.502,00	

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	400	Orang	132.701.502,00	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	400	Orang	132.701.502,00	

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	RANCANGAN AKHIR RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN 2025						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	
	Fasilitasi MTQ Tingkat Kecamatan Muara Jawa dan Tingkat Kabupaten	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	400	Orang	132.701.502,00	Fasilitasi MTQ Tingkat Kecamatan Muara Jawa dan Tingkat Kabupaten	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	400	Orang	132.701.502,00	Pagu anggaran kurang, biaya yang dibutuhkan sesuai hasil rapat Pengururs LPTQ Kecamatan dengan Bidang Kesra dan Sekda per Kecamatan membutuhkan minimal Rp.500.000.000,- baik untuk MTQ Tk. Kecamatan maupun Tk. Kabupaten
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	Dokumen	-	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	Dokumen	-	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Muara Jawa		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	Dokumen	-	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Muara Jawa		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	Dokumen	-	

	KELURAHAN MUARA JAWA ILIR	Kelurahan Muara Jawa Ilir				1.900.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA ILIR	Kelurahan Muara Jawa Ilir				1.900.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	Nilai	130.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	Nilai	130.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	5	Layanan	63.180.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Layanan	63.180.000,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.150.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.150.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.150.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.150.000,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.590.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.590.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.590.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.590.000,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	10.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	10.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	10.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	10.000.000,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3.120.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3.120.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3.120.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3.120.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98	Laporan	38.320.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98	Laporan	38.320.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98	Laporan	38.320.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98	Laporan	38.320.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	6	Unit	33.160.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	6	Unit	33.160.000,00	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	10.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	10.000.000,00	
	Pengadaan Mebel Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	10.000.000,00	Pengadaan Mebel Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	10.000.000,00	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	23.160.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	23.160.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	23.160.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	23.160.000,00	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	16.470.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	16.470.000,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.950.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.950.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.950.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.950.000,00	

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	RANCANGAN AKHIR RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN 2025						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	26	Unit	17.190.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	26	Unit	17.190.000,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	Unit	7.190.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	Unit	7.190.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	Unit	7.190.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	Unit	7.190.000,00	
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	Unit	-	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya	0	Unit	-	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	Unit	-	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	Persen	1.760.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	Persen	1.760.000.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	3	Kegiatan	760.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Terlaksananya Kegiatan di Desa/Kelurahan	3	Kegiatan	760.000.000,00	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5	Lembaga	10.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5	Lembaga	10.000.000,00	
	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5	Lembaga	10.000.000,00	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5	Lembaga	10.000.000,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	Unit	450.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	Unit	450.000.000,00	
	- Pembuatan Tempat Parkir Kantor Lurah Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	149.320.000,00	- Pembuatan Tempat Parkir Kantor Lurah Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	149.320.000,00	
	- Peningkatan Badan Jalan RT.016 Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	150.859.990,00	- Peningkatan Badan Jalan RT.016 Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	150.859.990,00	
	- Pembangunan Posyandu Tenggiri RT.017 Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	149.820.010,00	- Pembangunan Posyandu Tenggiri RT.017 Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	149.820.010,00	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7	Pokmas/Ormas	300.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7	Pokmas/Ormas	300.000.000,00	
	Fasilitasi HUT RI Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	55.824.000,00	Fasilitasi HUT RI Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	55.824.000,00	
	Operasional PKK Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	23.678.800,00	Operasional PKK Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	23.678.800,00	
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan posyandu Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas/Ormas	213.774.300,00	Pengadaan peralatan dan perlengkapan posyandu Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas/Ormas	213.774.300,00	
	Fasilitasi Lomba Kelurahan Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	6.722.900,00	Fasilitasi Lomba Kelurahan Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	6.722.900,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	236	Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	20	Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000.000,00	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	20	Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	20	Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000.000,00	
	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	20	Lembaga/RT	1.000.000.000,00	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	20	Lembaga/RT	1.000.000.000,00	Program Dedikasi

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	RANCANGAN AKHIR RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN 2025						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	10.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	10.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1	Kegiatan	10.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1	Kegiatan	10.000.000,00	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100	Orang	10.000.000,00	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100	Orang	10.000.000,00	
	Fasilitasi HUT MTQ Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100	Orang	10.000.000,00	Fasilitasi HUT MTQ Kelurahan Muara Jawa Ilir	Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100	Orang	10.000.000,00	
	KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH	Kelurahan Muara Jawa Tengah				1.690.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH	Kelurahan Muara Jawa Tengah				1.690.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	Nilai	130.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	Nilai	130.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	4	Layanan	66.780.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	4	Layanan	66.780.000,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	Paket	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	Paket	-	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	20.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	20.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	20.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	20.000.000,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	15.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	15.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	15.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	15.000.000,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.780.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.780.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.780.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.780.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Laporan	30.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Laporan	30.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Laporan	30.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Laporan	30.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	6	Unit	35.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	6	Unit	35.000.000,00	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	-	Pengadaan Mebel	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	-	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Unit	35.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Unit	35.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Unit	35.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Unit	35.000.000,00	

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	RANCANGAN AKHIR RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN 2025						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	13.220.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	13.220.000,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.100.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.100.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.100.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.100.000,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12.120.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12.120.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12.120.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12.120.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	6	Unit	15.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	6	Unit	15.000.000,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	5.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	5.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	5.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	5.000.000,00	
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	Unit	-	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	Unit	-	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	-	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	Persen	1.550.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	Persen	1.550.000.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	2	Kegiatan	750.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	2	Kegiatan	750.000.000,00	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	Lembaga	-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	Lembaga	-	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	Unit	450.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	Unit	450.000.000,00	
	Peningkatan Badan Jalan Gang Zakky Blok 2 RT.01 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	102.500.000,00	Peningkatan Badan Jalan Gang Zakky Blok 2 RT.01 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	102.500.000,00	
	Pembangunan Ruang Rapat Kantor Lurah Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	230.000.000,00	Pembangunan Ruang Rapat Kantor Lurah Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	230.000.000,00	
	Pembuatan Turap Jalan Depan Madrasah RT 11 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	117.500.000,00	Pembuatan Turap Jalan Depan Madrasah RT 11 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	117.500.000,00	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas/Ormas	300.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas/Ormas	300.000.000,00	
	Fasilitasi HUT RI Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	110.290.000,00	Fasilitasi HUT RI Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	110.290.000,00	
	Operasional PKK Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	25.000.000,00	Operasional PKK Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	25.000.000,00	
	Pengadaan sarana dan prasarana posyandu Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas/Ormas	164.710.000,00	Pengadaan sarana dan prasarana posyandu Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas/Ormas	164.710.000,00	

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	RANCANGAN AKHIR RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN 2025						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	16	Lembaga Kemasyarakatan	800.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	16	Lembaga Kemasyarakatan	800.000.000,00	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	16	Lembaga Kemasyarakatan	800.000.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	16	Lembaga Kemasyarakatan	800.000.000,00	
	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	16	Lembaga/RT	800.000.000,00	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	16	Lembaga/RT	800.000.000,00	Program Dedikasi
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	10.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	10.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	1	Kegiatan	10.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	1	Kegiatan	10.000.000,00	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	10.000.000,00	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	10.000.000,00	
	Fasilitasi STQ Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	10.000.000,00	Fasilitasi STQ Kelurahan Muara Jawa Tengah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	10.000.000,00	

	KELURAHAN MUARA JAWA ULU	Kelurahan Muara Jawa Ulu				2.899.720.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA ULU	Kelurahan Muara Jawa Ulu				2.899.720.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	Nilai	83.720.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	Nilai	83.720.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	5	Layanan	49.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	5	Layanan	49.000.000,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.000.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.000.000,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.000.000,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	9.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	9.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	9.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	9.000.000,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.000.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27	Laporan	27.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27	Laporan	27.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27	Laporan	27.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27	Laporan	27.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	0	Unit	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	0	Unit	-	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	-	Pengadaan Mebel	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	-	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	RANCANGAN AKHIR RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN 2025						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	15.720.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	15.720.000,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.200.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.200.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.200.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.200.000,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	27	Unit	19.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	27	Unit	19.000.000,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26	Unit	9.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26	Unit	9.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26	Unit	9.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26	Unit	9.000.000,00	
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	Unit	-	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	Unit	-	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	-	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	Persen	2.806.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	Persen	2.806.000.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	3	Kegiatan	756.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	3	Kegiatan	756.000.000,00	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50	Lembaga	6.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50	Lembaga	6.000.000,00	
	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50	Lembaga	6.000.000,00	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50	Lembaga	6.000.000,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	Unit	450.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	Unit	450.000.000,00	
	Pembuatan Drainase Gg Gembira RT 14 Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	149.960.000,00	Pembuatan Drainase Gg Gembira RT 14 Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	149.960.000,00	
	Semenisasi Gg H. Arsad RT 17 Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	149.770.000,00	Semenisasi Gg H. Arsad RT 17 Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	149.770.000,00	
	Pembuatan Pandopo/Balai Pertemuan RT 24 Galendrong dock Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	150.270.000,00	Pembuatan Pandopo/Balai Pertemuan RT 24 Galendrong dock Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	150.270.000,00	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14	Pokmas/Ormas	300.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14	Pokmas/Ormas	300.000.000,00	
	Fasilitasi HUT RI Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	30.045.000,00	Fasilitasi HUT RI Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	30.045.000,00	
	Operasional dan pengadaan perlengkapan PKK Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	62.315.000,00	Operasional dan pengadaan perlengkapan PKK Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	62.315.000,00	
	Fasilitasi Lomba Kelurahan- Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	7.700.000,00	Fasilitasi Lomba Kelurahan- Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	7.700.000,00	
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan posyandu Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11	Pokmas/Ormas	199.940.000,00	Pengadaan peralatan dan perlengkapan posyandu Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11	Pokmas/Ormas	199.940.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	41	Lembaga/RT	2.050.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	41	Lembaga/RT	2.050.000.000,00	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	41	Lembaga/RT	2.050.000.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	41	Lembaga/RT	2.050.000.000,00	

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	41	Lembaga/RT	2.050.000.000,00	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	41	Lembaga/RT	2.050.000.000,00	Program Dedikasi

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	RANCANGAN AKHIR RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN 2025						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	10.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	10.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	1	Kegiatan	10.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	1	Kegiatan	10.000.000,00	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25	Orang	10.000.000,00	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25	Orang	10.000.000,00	
	Fasilitasi MTQ Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25	Orang	10.000.000,00	Fasilitasi MTQ Kelurahan Muara Jawa Ulu	Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25	Orang	10.000.000,00	

	KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR	Kelurahan Muara Jawa Pesisir				2.496.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR	Kelurahan Muara Jawa Pesisir				2.496.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	Nilai	130.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	Nilai	130.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	5	Layanan	68.360.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	5	Layanan	68.360.000,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.500.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.500.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.500.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.500.000,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	13.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	13.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	13.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	13.000.000,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	15.902.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	15.902.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	15.902.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	15.902.000,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.958.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.958.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.958.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.958.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	Laporan	35.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	Laporan	35.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	Laporan	35.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	Laporan	35.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	2	Unit	29.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	2	Unit	29.000.000,00	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	-	Pengadaan Mebel	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	-	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	29.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	29.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	29.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	29.000.000,00	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	RANCANGAN AKHIR RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN 2025						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	15.820.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	15.820.000,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.300.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.300.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.300.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.300.000,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	6	Unit	16.820.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	6	Unit	16.820.000,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	6.820.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	6.820.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	6.820.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	6.820.000,00	
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	Unit	-	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	Unit	-	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	-	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	Persen	2.356.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	Persen	2.356.000.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	3	Kegiatan	756.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	3	Kegiatan	756.000.000,00	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36	Lembaga	6.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36	Lembaga	6.000.000,00	
	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36	Lembaga	6.000.000,00	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36	Lembaga	6.000.000,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4	Unit	450.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4	Unit	450.000.000,00	
	Peningkatan Jalan Gang Pusaka RT.25 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	155.900.000,00	Peningkatan Jalan Gang Pusaka RT.25 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	155.900.000,00	
	Pembuatan Jembatan Gang Restu Tembus Gang Langgar RT.31 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	90.000.000,00	Pembuatan Jembatan Gang Restu Tembus Gang Langgar RT.31 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	90.000.000,00	
	Pembuatan cor Beton parit perbatasan antara.RT.04 dan RT.03 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	140.000.000,00	Pembuatan cor Beton parit perbatasan antara.RT.04 dan RT.03 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	140.000.000,00	
	Pemasangan Paving Halaman Kantor Lurah Muara Jawa Pesisir RT.23 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	64.100.000,00	Pemasangan Paving Halaman Kantor Lurah Muara Jawa Pesisir RT.23 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	64.100.000,00	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	Pokmas/Ormas	300.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	Pokmas/Ormas	300.000.000,00	
	Operasional PKK Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	20.904.000,00	Operasional PKK Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	20.904.000,00	
	Pengadaan seragam PKK Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	24.398.000,00	Pengadaan seragam PKK Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	24.398.000,00	
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan posyandu Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7	Pokmas/Ormas	228.901.000,00	Pengadaan peralatan dan perlengkapan posyandu Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7	Pokmas/Ormas	228.901.000,00	

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	RANCANGAN AKHIR RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN 2025						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	
	Partisipasi HUT RI Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	25.797.000,00	Partisipasi HUT RI Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	25.797.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	32	Lembaga/RT	1.600.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	32	Lembaga/RT	1.600.000.000,00	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	32	Lembaga/RT	1.600.000.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	32	Lembaga/RT	1.600.000.000,00	
	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	32	Lembaga/RT	1.600.000.000,00	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	32	Lembaga/RT	1.600.000.000,00	Program Dedikasi
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	10.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	10.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	11	Kegiatan	10.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	11	Kegiatan	10.000.000,00	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	10.000.000,00	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	10.000.000,00	
	Fasilitasi MTQ Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	10.000.000,00	Fasilitasi MTQ Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	10.000.000,00	
	KELURAHAN TELUK DALAM	Kelurahan Teluk Dalam				1.239.620.000,00	KELURAHAN TELUK DALAM	Kelurahan Teluk Dalam				1.239.620.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Teluk Dalam	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	Nilai	121.620.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Teluk Dalam	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	Nilai	121.620.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Teluk Dalam	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Layanan	44.700.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Teluk Dalam	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Layanan	44.700.000,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.500.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.500.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.500.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.500.000,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	12.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	12.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	12.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	12.000.000,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	Paket	8.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	Paket	8.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	Paket	8.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	Paket	8.000.000,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.500.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.500.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.500.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.500.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26	Laporan	21.700.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26	Laporan	21.700.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26	Laporan	21.700.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26	Laporan	21.700.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	7	Unit	41.400.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	7	Unit	41.400.000,00	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	-	Pengadaan Mebel	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	-	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	Unit	41.400.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	Unit	41.400.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	Unit	41.400.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	Unit	41.400.000,00	

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	Penyediaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	RANCANGAN AKHIR RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN 2025						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	17.120.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	17.120.000,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	2.600.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	2.600.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	2.600.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	2.600.000,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	9	Unit	18.400.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	9	Unit	18.400.000,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	Unit	8.400.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	Unit	8.400.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	Unit	8.400.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	Unit	8.400.000,00	
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	Unit	-	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	Unit	-	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	-	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Teluk Dalam	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	Persen	1.108.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Teluk Dalam	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	Persen	1.108.000.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	3	Kegiatan	758.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	3	Kegiatan	758.000.000,00	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11	Lembaga	8.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11	Lembaga	8.000.000,00	
	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11	Lembaga	8.000.000,00	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11	Lembaga	8.000.000,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	Unit	450.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	Unit	450.000.000,00	
	Lanjutan pembangunan poskamling RT.03 Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	51.360.000,00	Lanjutan pembangunan poskamling RT.03 Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	51.360.000,00	
	Pelebaran Poskamling RT.02 Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	30.000.000,00	Pelebaran Poskamling RT.02 Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	30.000.000,00	
	Pembangunan Poskamling RT. 07 Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	49.320.000,00	Pembangunan Poskamling RT. 07 Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	49.320.000,00	
	Rehab WC pelabuhan RT. 01 Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	30.000.000,00	Rehab WC pelabuhan RT. 01 Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	30.000.000,00	
	Lanjutan Pembangunan Kantor Lurah Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	164.320.000,00	Lanjutan Pembangunan Kantor Lurah Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	164.320.000,00	
	Pembangunan turap RT. 05 Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	65.000.000,00	Pembangunan turap RT. 05 Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	65.000.000,00	
	Semenisasi Gang Pelabuhan RT. 04 Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	60.000.000,00	Semenisasi Gang Pelabuhan RT. 04 Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	60.000.000,00	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11	Pokmas/Ormas	300.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11	Pokmas/Ormas	300.000.000,00	
	Fasilitasi Kegiatan Lomba Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	12.870.400,00	Fasilitasi Kegiatan Lomba Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	12.870.400,00	

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	RANCANGAN AKHIR RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN 2025						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	
	Fasilitasi Kegiatan Lomba Posyandu Kel. Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	8.740.400,00	Fasilitasi Kegiatan Lomba Posyandu Kel. Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	8.740.400,00	
	Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	14.834.200,00	Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	14.834.200,00	
	Partisipasi HUT RI Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	10.252.000,00	Partisipasi HUT RI Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	10.252.000,00	
	Pembuatan Turap Halaman Masjid Al Fallah Kel. Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	57.040.000,00	Pembuatan Turap Halaman Masjid Al Fallah Kel. Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	57.040.000,00	
	Pengadaan Meubelair Posyandu Bawal I dan II Kel. Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	Pokmas/Ormas	25.922.000,00	Pengadaan Meubelair Posyandu Bawal I dan II Kel. Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	Pokmas/Ormas	25.922.000,00	
	Pengadaan Meubelair Kantor LPM Kel. Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	20.341.000,00	Pengadaan Meubelair Kantor LPM Kel. Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	20.341.000,00	
	Rehab Atap Langgar Assalam RT.06 Kel. Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	55.000.000,00	Rehab Atap Langgar Assalam RT.06 Kel. Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	55.000.000,00	
	Pemeliharaan Kantor LPM Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	33.640.000,00	Pemeliharaan Kantor LPM Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	33.640.000,00	
	Pemeliharaan Gedung BPU Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	61.360.000,00	Pemeliharaan Gedung BPU Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	61.360.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	7	Lembaga/RT	350.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	7	Lembaga/RT	350.000.000,00	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7	Lembaga/RT	350.000.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7	Lembaga/RT	350.000.000,00	
	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7	Lembaga/RT	350.000.000,00	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7	Lembaga/RT	350.000.000,00	Program Dedikasi
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Teluk Dalam	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	10.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Teluk Dalam	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	10.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	11	Kegiatan	10.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	11	Kegiatan	10.000.000,00	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60	Orang	10.000.000,00	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60	Orang	10.000.000,00	
	Fasilitasi HUT RI dan MTQ Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60	Orang	10.000.000,00	Fasilitasi HUT RI dan MTQ Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60	Orang	10.000.000,00	
	KELURAHAN DONDANG	Kelurahan Dondang				1.560.000.000,00	KELURAHAN DONDANG	Kelurahan Dondang				1.560.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Dondang	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	Nilai	100.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Dondang	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	Nilai	100.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Dondang	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	Layanan	50.240.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Dondang	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	Layanan	50.240.000,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	Paket	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	Paket	-	

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	RANCANGAN AKHIR RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN 2025						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	11.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	11.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	11.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	11.000.000,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	11.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	11.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	11.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	11.000.000,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.000.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32	Laporan	26.240.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32	Laporan	26.240.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32	Laporan	26.240.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32	Laporan	26.240.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Dondang	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	2	Unit	15.460.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Dondang	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	2	Unit	15.460.000,00	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	-	Pengadaan Mebel	Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	-	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Dondang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	15.460.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Dondang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	15.460.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	15.460.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	15.460.000,00	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Dondang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Dondang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Dondang	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	15.760.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Dondang	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	15.760.000,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.240.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.240.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.240.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.240.000,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Dondang	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	15	Unit	18.540.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Dondang	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	15	Unit	18.540.000,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Dondang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Dondang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Dondang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	Unit	8.540.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Dondang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	Unit	8.540.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	Unit	8.540.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	Unit	8.540.000,00	
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kelurahan Dondang	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	Unit	-	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kelurahan Dondang	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	Unit	-	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Dondang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Dondang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	-	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Dondang	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	Persen	1.450.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Dondang	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	Persen	1.450.000.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Dondang	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	0	Kegiatan	750.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Dondang	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	4	Kegiatan	750.000.000,00	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Dondang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	Lembaga	-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Dondang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	Lembaga	-	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dondang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	Unit	450.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dondang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	Unit	450.000.000,00	

	Lanjutan Pembuatan Pagar Kantor kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	153.560.000,00		Lanjutan Pembuatan Pagar Kantor kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	153.560.000,00	

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	RANCANGAN AKHIR RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN 2025						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	
	Pembuatan Gedung Karang Taruna Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	156.120.000,00	Pembuatan Gedung Karang Taruna Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	156.120.000,00	
	Lanjutan Pemasangan Paving Halaman kantor Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	140.320.000,00	Lanjutan Pemasangan Paving Halaman kantor Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	140.320.000,00	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dondang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas	300.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dondang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas	300.000.000,00	
	Operasional PKK Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	34.589.800,00	Operasional PKK Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	34.589.800,00	
	Fasilitasi HUT RI Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	55.940.000,00	Fasilitasi HUT RI Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	55.940.000,00	
	Fasilitasi Lomba Kelurahan-Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	3.700.000,00	Fasilitasi Lomba Kelurahan-Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	3.700.000,00	
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan posyandu Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	Pokmas/Ormas	205.770.200,00	Pengadaan peralatan dan perlengkapan posyandu Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	Pokmas/Ormas	205.770.200,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Dondang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	14	Lembaga/RT	700.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Dondang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	14	Lembaga/RT	700.000.000,00	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Dondang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	14	Lembaga/RT	700.000.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Dondang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	14	Lembaga/RT	700.000.000,00	
	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	14	Lembaga/RT	700.000.000,00	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	14	Lembaga/RT	700.000.000,00	Program Dedikasi
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Dondang	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	10.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Dondang	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	10.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kelurahan Dondang	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	11	Kegiatan	10.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kelurahan Dondang	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	11	Kegiatan	10.000.000,00	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Dondang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25	Orang	10.000.000,00	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Dondang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25	Orang	10.000.000,00	
	Fasilitasi MTQ Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25	Orang	10.000.000,00	Fasilitasi MTQ Kelurahan Dondang	Kelurahan Dondang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25	Orang	10.000.000,00	
	KELURAHAN TAMA POLE	Kelurahan Tama Pole				1.035.000.000,00	KELURAHAN TAMA POLE	Kelurahan Tama Pole				1.035.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Tama Pole	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	Nilai	125.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Tama Pole	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	Nilai	125.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	5	Layanan	65.480.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	5	Layanan	65.480.000,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.500.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.500.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.500.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.500.000,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Tama Pole	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	12.990.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Tama Pole	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	12.990.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	12.990.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	12.990.000,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	12.990.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	12.990.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	12.990.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	12.990.000,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Tama Pole	Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Tama Pole	Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3.000.000,00	

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	RANCANGAN AKHIR RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN 2025						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42	Laporan	35.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42	Laporan	35.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42	Laporan	35.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42	Laporan	35.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Tama Pole	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	5	Unit	25.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Tama Pole	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	5	Unit	25.000.000,00	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	-	Pengadaan Mebel	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	-	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	25.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	25.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	25.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	25.000.000,00	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Tama Pole	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	16.520.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Tama Pole	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	16.520.000,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	2.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	2.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	2.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	2.000.000,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	19	Unit	18.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	19	Unit	18.000.000,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit	10.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit	10.000.000,00	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	8.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	8.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	8.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	8.000.000,00	
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	Unit	-	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	Unit	-	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	-	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Tama Pole	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	Persen	900.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Tama Pole	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	Persen	900.000.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	3	Kegiatan	750.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	3	Kegiatan	750.000.000,00	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	Lembaga	-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	Lembaga	-	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	Unit	450.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	Unit	450.000.000,00	
	Lanjutan Semenisasi Jalan Suka Damai Rt 02 Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	148.900.000,00	Lanjutan Semenisasi Jalan Suka Damai Rt 02 Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	148.900.000,00	
	Pembuatan Pendopo Nelayan Danau Kering RT 03 Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	147.000.000,00	Pembuatan Pendopo Nelayan Danau Kering RT 03 Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	147.000.000,00	
	Lanjutan Semenisasi Jalan Hasbullah Menuju Jalan Berkah RT 01 Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	154.100.000,00	Lanjutan Semenisasi Jalan Hasbullah Menuju Jalan Berkah RT 01 Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	154.100.000,00	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas/Ormas	300.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas/Ormas	300.000.000,00	
	Operasional PKK Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	15.000.000,00	Operasional PKK Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	15.000.000,00	

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	RANCANGAN AKHIR RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN 2025						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	
	Partisipasi HUT RI Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	20.000.000,00	Partisipasi HUT RI Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	20.000.000,00	
	Pengadaan perahu ketinting untuk Kelompok Nelayan Cahaya Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	65.000.000,00	Pengadaan perahu ketinting untuk Kelompok Nelayan Cahaya Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	65.000.000,00	
	Peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	200.000.000,00	Peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	200.000.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	3	Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	3	Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000,00	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3	Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3	Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000,00	
	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3	Lembaga/RT	150.000.000,00	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3	Lembaga/RT	150.000.000,00	Program Dedikasi
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Tama Pole	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	10.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Tama Pole	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	10.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kelurahan Tama Pole	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	1	Kegiatan	10.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kelurahan Tama Pole	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	1	Kegiatan	10.000.000,00	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	10.000.000,00	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	10.000.000,00	
	Fasilitasi MTQ Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	10.000.000,00	Fasilitasi MTQ Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	10.000.000,00	
	KELURAHAN MUARA KEMBANG	Kelurahan Muara Kembang				1.641.000.000,00	KELURAHAN MUARA KEMBANG	Kelurahan Muara Kembang				1.641.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Muara Kembang	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	Nilai	121.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Muara Kembang	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	Nilai	121.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Muara Kembang	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Layanan	64.880.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Muara Kembang	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Layanan	64.880.000,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	4.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	4.000.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	4.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	4.000.000,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	14.400.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	14.400.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	14.400.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	14.400.000,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	12.403.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	12.403.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	12.403.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	12.403.000,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.077.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.077.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.077.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.077.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	32.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	32.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	32.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	32.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	2	Unit	25.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	2	Unit	25.000.000,00	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	-	Pengadaan Mebel	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	-	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	25.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	25.000.000,00	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	25.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	25.000.000,00	

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	RANCANGAN AKHIR RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN 2025						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	16.120.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	16.120.000,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.600.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.600.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.600.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.600.000,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.520.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	8	Unit	15.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	8	Unit	15.000.000,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	10.000.000,00	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	Unit	5.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	Unit	5.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	Unit	5.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	Unit	5.000.000,00	
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	Unit	-	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	Unit	-	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	-	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Muara Kembang	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	Persen	1.510.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Muara Kembang	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	Persen	1.510.000.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	0	Kegiatan	760.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	4	Kegiatan	760.000.000,00	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19	Lembaga	10.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19	Lembaga	10.000.000,00	
	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19	Lembaga	10.000.000,00	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19	Lembaga	10.000.000,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5	Unit	450.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5	Unit	450.000.000,00	
	Peningkatan Badan Jalan Petinggi Bahran Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	96.898.000,00	Peningkatan Badan Jalan Petinggi Bahran Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	96.898.000,00	
	Pembuatan Gudang Kantor Lurah Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	80.898.000,00	Pembuatan Gudang Kantor Lurah Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	80.898.000,00	
	Pembuatan turap jalan Kantor Lurah Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	91.698.000,00	Pembuatan turap jalan Kantor Lurah Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	91.698.000,00	
	Pembuatan Jembatan RT.11 Muara Pegah Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	85.898.000,00	Pembuatan Jembatan RT.11 Muara Pegah Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	85.898.000,00	
	Pembuatan Turap Kuburan Muslimin Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	94.608.000,00	Pembuatan Turap Kuburan Muslimin Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	94.608.000,00	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8	Pokmas/Ormas	300.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8	Pokmas/Ormas	300.000.000,00	
	Operasional PKK Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	46.722.500,00	Operasional PKK Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	46.722.500,00	
	Partisipasi HUT RI Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	29.510.000,00	Partisipasi HUT RI Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	29.510.000,00	
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan posyandu Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas/Ormas	101.447.500,00	Pengadaan peralatan dan perlengkapan posyandu Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas/Ormas	101.447.500,00	

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

	Pengadaan sarana dan prasarana UMKM Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas		Pengadaan sarana dan prasarana UMKM Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	58.162.500,00	

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	RANCANGAN AKHIR RKPD 2025						HASIL ANALISA KEBUTUHAN 2025						CATATAN PENTING
	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET		PENDANAAN INDIKATIF 2025	
	Pengadaan sarana dan prasarana TK dan PAUD Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	64.157.500,00	Pengadaan sarana dan prasarana TK dan PAUD Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	64.157.500,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	15	Lembaga Kemasyarakatan	750.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	15	Lembaga/RT	750.000.000,00	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	15	Lembaga/RT	750.000.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	15	Lembaga/RT	750.000.000,00	
	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Tama Pole	Kelurahan Tama Pole	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	15	Lembaga/RT	750.000.000,00	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	15	Lembaga/RT	750.000.000,00	Program Dedikasi
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Muara Kembang	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	10.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kelurahan Muara Kembang	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	10.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	1	Kegiatan	10.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	1	Kegiatan	10.000.000,00	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	10.000.000,00	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	10.000.000,00	
	Fasilitasi MTQ Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	10.000.000,00	Fasilitasi MTQ Kelurahan Muara Kembang	Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	10.000.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.Perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kabupaten.

Perencanaan pembangunan kecamatan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan secara partisipatif. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari desa, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelu
rahan di kecamatan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupatenpada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap tahun pada bulan Februari dengan keluaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja Kecamatan (Sesuai dengan PP No.08/2008 dan PP No. 19/2008).

Berikut rekapitulasi usulan program dan kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana Tabel T.C-32

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
1	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang H. Arsyad RT 17 Kel Muara Jawa Ulu (0°48'45.4"S 117°13'52.2"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi jalan rusak dan becek saat hujan (Semenisasi Gang H. Arsyad RT 17) P1,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
2	Fasilitasi sarana prasarana desa	Galendrong Dook RT 24 Kel Muara Jawa Ulu 0°49'27.73"S 117°12'41.29"E, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pada Umumnya Para Warga bertempat tinggal berjauhan utk rapar warga butuh wadah (Pembangunan Pendopo Pertemuan RT 24 Galendrong Dook) P1,OPD TUJUAN : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Gembira RT 14 kel. muara jawa ulu 0°49'25.98"S 117°14'5.74"E, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	sering terjadi banjir karena paritnya blm ada (Pembuatan Drainase Gg Gembira RT 14) P1 Kel ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
4	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jalan Ahmad Sifa RT.13 Kelurahan Dondang Kecamatana muara jawa kutai kartanegaralat. 0.772947° - long 117.228593° P1 KELURAHAN , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	lanjutan pembuatan pagar kelurahan dondang yang belum selesai sesuai dengan bangunan kantor (Pembuatan Pagar Kantor kelurahan Dondang) ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
5	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gg Bersatu RT 37 kel muara jawa ulu 0°49'22.87"S 117°14'49.54"E, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jln Rusak (Pengaspalan Gg Bersatu RT 37 Jalan Poros) P1 Kel,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
6	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gg Belimbing RT 16 Kel Muara Jawa Ulu 0°48'57.96"S 117°14'7.39"E, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi jln rusak (Lanjutan Semenisasi Gg Belimbing RT 16) P1 Kel ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
7	Ruang Terbuka Non Hijau di perkotaan (Paving, Rabat/Semenisasi)	Jalan Ahmad sifa Rt.13 Kelurahan Dondang Kecamatana muara jawa lat. 0.776268° - long 117.228665° P1 KELURAHAN , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya Parkiran Roda 2 dan Roda 4 Kelurahan dondang (Pembuatan Tempat Parkir Kantor Kelurahan Dondang) ,OPD TUJUAN : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Jalan Ahmad sifa Rt 13 Kelurahan Dondang Kecamatan muara Jawa lat. 0.772657° - long 117.228629° P1 KELURAHAN , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya bangunan posyandu lansia keluarahan dondang (Pembangunan Posyandu Lansia Rambai Kelurahan Dondang) ,OPD TUJUAN : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Jalan Ahmad sifa Rt 13 Kelurahan Dondang Kecamatana Muara Jawa lat. 0.772657° - long 117.228629° PI KELURAHAN , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya Posyandu Balita Mujair kelurahan Dondang (Pembangunan Posyandu Balita Mujair Kelurahan Dondang) ,OPD TUJUAN : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Jl. Kuburan RT 01 Kel Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Akses jalan Menuju Kuburan Muslimin Hdl 1 (Lanjutan Semenisasi Jl. Kuburan RT 01),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
11	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Jl Toha RT 01 Kel. Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Saluran Air tidak mengalir (Normalisasi Paret RT 01 Kel Muara Jawa Ulu),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
12	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Jl Delima Gg Barru Rt 02 Kel. Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering Terjadi banjir Jika Hujan Turun (Pembuatan Drainase Gg Barru RT 02),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
13	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Baru RT 02 Kel. Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	kondisi jl rusak apa lagi saat hujan (Lanjutan Semenisasi Gg Baru RT 02 Kel. Muara Jawa Ulu),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
14	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Jl. Damai RT 02 Kel Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering Banjir saat Hujan (Pembuatan Drainase Jl. Damai RT 02),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
15	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Jl. Delima Gang Pusban 1 RT 03 Kel Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering banjir saat hujan (Pembuatan Drainase Gang Pusban 1 RT 03),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
16	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Jl. Delima Gang Baru RT 03 kel. muara jawa ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	kondisi jl labil (Pembuatan Turap Jl. Delima Gang Baru RT 03),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
17	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Pusban RT 03 Kel Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi jl sering becek saat hujan turun (Semenisasi Gang Pusban RT 03),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
18	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Apel RT 04 Kel. Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	semenisasi jalan lama sudah rusak dan berlubang (Pengaspalan Gang Apel RT 04),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
19	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Junaidi RT 05 Kel Muara Jawa ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan Gang rusak dan berlubang (Semenisasi Gang Junaidi RT 05),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
20	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Murni RT 05 Kel Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	kondisi jln rusak (Semenisasi Gang Murni RT 05),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
21	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Central RT 05 Kel. Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi jln rusak (Semenisasi Gang Central RT 05),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
22	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Swadaya RT 06 KEL Muara Jawa Ulu 0°49'34.19"S 117°14'59.98"E, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering Terjadi Banjir saat Hujan (Pembuatan Drainase Gang Swadaya RT 06),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
23	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Buntu RT 07 Kel. Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi jl Rusak (Semenisasi Gang Buntu RT 07),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
24	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Merpati RT 07 Kel Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi jl rusak (Pengaspalan Gang Merpati RT 07),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
25	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Sentral RT 07 Kel. Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	kondisi jl rusak (Pengaspalan Gang Sentral RT 07),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
26	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Anggrek RT 08 Kel. Muara Jawa ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jl Rusak (Lanjutan Aspal jln Gang Anggrek RT 08),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
27	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gg Anggrek RT 08 Kel Muara Jawa Ulu , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	sering terjadi banjir (Pembangunan Drainase Dari RT 08 Ke RT 07) 0°49'32.14"S 117°14'50.29"E,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
28	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang 17 Rt 09 , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering Banjir Jika Hujan (Lanjutan Drainase Antara Gang 17 Dan Gang Berkah),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
29	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gg 17 RT 09 Kel. Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering terjadi banjir saat hujan (Lanjutan Drainase Dari Pos Kamling Menuju Gang Melati),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
30	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gg 17 Rt 09 Kel Muara Jawa Ulu 0°49'31.93"S 117°14'44.09"E, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering banjir saat hujan (Pembuatan Drainase Dari Gang 17 Menuju Drainase Batas RT 10),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
31	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Jamiabul RT 10 Kel Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	jalan rusak (Semenisasi Gang Jamiabul RT 10),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
32	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Jamiabul RT 10, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi jl rusak (Semenisasi Gang Jamiabul RT 10),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
33	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gg DDI Rt 10, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering banjir (Drainase Parit Gg DDI RT 10),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
34	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Jamiabul RT 10, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering banjir saat hujan (Pembuatan Drainase Gang Jamiabul RT 10),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
35	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Jamiabul RT 10 0°49'30.36"S 117°14'40.26"E, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering Banjir (Semenisasi Gang Jamiabul RT 10) P1 Kec ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
36	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Suri 4 RT 11, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi jl Rusak (Semenisasi Gang Suri 4 RT 11),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
37	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Suri RT 11, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi jl rusak (Semenisasi Gang Suri RT 11),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
38	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Shalom 1 RT 11, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jl Rusak (semenisasi Gang Shalom 1 RT 11),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
39	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Brunei RT 12, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi jl Rusak (Semenisasi Gang Brunei RT 12),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
40	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gg Bersatu Blok E RT 37, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jl Rusak(Lanjutan Semenisasi Gg Bersatu Blok E) RT 37,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
41	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gg Bersatu Blok C RT 37, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	kondisi jl Rusak (Semenisasi Gg Bersatu Blok C RT 37),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
42	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gg Bersatu Blok D RT 37, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jl Rusak(Semenisasi Gg Bersatu Blok D RT 37),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
43	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gg Bersatu Blok E1 RT 37, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jl Rusak(Semenisasi Gg Bersatu Blok E1 RT 37),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
44	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gg Bersatu Blok F RT 37, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi jl rusak (Semenisasi Gg Bersatu Blok F RT 37),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
45	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gg Bersatu Jl Suka-suka RT 37, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi jl rusak (Semenisasi Gg Bersatu Jl Suka- suka RT 37),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
46	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Bersama RT 14 , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi jl rusak (Peningkatan Jalan Gang Bersama RT 14),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
47	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Bahtera RT 15, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi masih jl setapak (pembuatan Badan Jalan Dari Gang Satria Tembus Gang Bahtera RT 15),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
48	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Jl Gg TPA RT 15, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi jl rusak dan berlubang(Pengaspalan Jl Gg TPA RT 15),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
49	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Pengaspalan Gang Nawawi RT 15, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jl Rusak (Pengaspalan Gang Nawawi RT 15),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
50	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Pengaspalan Gang Usaha RT 17, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jl Rusak (Pengaspalan Gang Usaha RT 17),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
51	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Badingsanak RT 17, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jl Rusak (Semenisasi Gang Badingsanak RT 17),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
52	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Durian 1 RT 18, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi jl Rusak (Semenisasi Gang Durian 1 RT 18),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
53	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	gg Abimayu RT 13 0°49'32.73"S 117°14'4.46"T, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi parit tersumbat dan meluap saat hujan deras(Normalisasi gg Abimayu RT 13),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
54	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gg Abimayu RT 13, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi jl rusak dan berlubang (Semenisasi Gg Abimayu RT 13),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
55	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gg Rajawali RT 13, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jl Rusak dan berlubang (Semenisasi Gg Rajawali RT 13),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
56	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jalan Air Panas RT.003 Kelurahan Dondang Lat 0.777047, Long 117.237780 P. 2 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya Tugu Perbatasan antara Kelurahan Dondang dan kelurahan Tama Pole (Pembuatan Tugu Batas Dondang Tama Pole) ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
57	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Jalan Nelayan RT 002 Kelurahan Dondang Lat.0.781770, Long 117.235706 P 2 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan (Semenisasi Jalan Nelayan RT.02) ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
58	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Jalan Masjid RT.002 Kelurqahan Dondang Lat 0.781807, Long 117.231750 P. 2 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Parit dikala hujan akan terjadi banjir karena buntunya saluran paret (Normalisasi Paret RT.02) ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
59	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	jalan diponegoro RT.006 kelurahan Dondang Lat 0.78742, Long 117.22504 P. 2 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Parit dikala hujan akan terjadi banjir karena buntunya saluran paret (Pembuatan Draenase Langgar AL- Kautsyar RT.06) ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
60	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Jalan Masjid RT.002 Kelurahan Dondang lat 0.781891, Long 117.235600 P. 2 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jembatan yang menuju jalan nelayan karena memalui akses jalan pertamina makanya dibangun jembatan untuk jalan alternatif (Jembatan Serong Jalan Masjid RT.02) ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
61	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	gg Nauli RT 32 0°48'37.42"S 117°14'0.41"E, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	kondisi jl Rusak (Semenisasi gg Nauli RT 32) P1 Kec,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
62	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	RT. 01 , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembagunan Gedung UMKM RT 01 Kelurahan Tama Pole (-0,7699193, 117,2439185) -P1,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
63	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	rt 02 jl. suka damai, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Lanjutan Semenisasi Jalan Suka Damai Rt 02 Kelurahan Tama Pole (-0,7803894, 117,2782665)-P1,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
64	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Jalan Masjid RT.02 Kedlurahan Dondang Lat 0.781940, Long 117.234955 P. 2 Kelurahan , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan (Semenisasi jalan masjid RT.02) ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
65	Pembangunan gedung perpustakaan desa/Kelurahan	Jalan Ahmad Sifa Rt 13 Kelurahan Dondang lat. 0.772657° - long 117.228629° P. 2 Kelurahan , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya bangunan yang harus nya menjadi kewajiban yang harus dibangun (Pembuatan Ruang Arsip Kantor Lurah Dondang) ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
66	Pembangunan gedung perpustakaan desa/Kelurahan	Jalan Ahmad Sifa RT 13 Kelurahan Dondang lat. 0.772657° - long 117.228629° P2. Kelurahan , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya bangunan yang harus nya menjadi kewajiban yang harus dibangun (Pembuatan Ruang Perpustakaan Kantor Lurah Dondang) ,OPD TUJUAN : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
67	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Jalan Diponegoro RT.001 Kelurahan Dondang Lat 0.786914, Long 117.229283 P.2 Kelurahan , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan (Semenisasi jalan Gang Hatta RT.01) ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
68	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Jalan Sutomo Rt.08 Gang 45 Kelurahan Dondang Lat 0.791504, Long 117.227626 , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan (Semenisasi Jalan Imbran RT.08) ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
69	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	jalan Sulawesi RT.13 kelurahan Dondang lat 0.776476, long 117.231252 P.2 Kelurahan , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan (Semenisasi Gang Saudara Rt 13) ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
70	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Jalan Sulawesi RT,12 kelurahan Dondang Lat 0.776707, Long 117.232177 P.2 kelurahan , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan (Lanjutan Semenisasi Gang Hasan Basri Rt 12) ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
71	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Jalan Sulaesi RT.12 kelurahan Dondang Lat 0.776620, Long 117.231700 P.2 kelurahan , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan (Lanjutan Semenisasi Gang Kembar Rt 12) ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
72	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Jalan Diponegoro RT.10 kelurahan Dondang Lat 0.787991, Long 117.223057 P.2 kelurahan , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan (Lanjutan Semenisasi gang Rasyid RT.10) ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
73	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Jalan air Panas Rt.003 kelurahan Dondang lat.0. 77717 long. 11723480 P. 3 kelurahan CSR PT. Pertamina Hulu Mahakam , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kebutuhan masyarakat yang belum bisa terpenuhi (Pengadaan Sound System Majelis Ta'lim AN NUR) ,OPD TUJUAN : Bagian Kesejahteraan Rakyat
74	Belanja Hibah Lembaga Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	jalan Pelita Rt.007 Kelurahan Dondang Lat-0.790197, Long117.229230 P. 3 Kelurahan CSR PT .Pertamina Hulu Mahakam, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kebutuhan masyarakat yang belum bisa terpenuhi (Pengadaan Atalase Sentral UMKM Dondang berseri Kelurahan Dondang) ,OPD TUJUAN : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
75	Fasilitasi Perizinan UMKM	jalan pelita RT. 007 Kelurahan Dondang Lat-0.790197, Long117.229230 P. 3 CSR Pertamina HUlu Sanga-Sanga (PHSS), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kebutuhan masyarakat yang belum bisa terpenuhi (Pembuaran Sentral UMKM Kelurahan Dondang) ,OPD TUJUAN : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
76	Belanja Hibah Lembaga Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Jalan kabaena RT.001 Kelurahan Dondang Lat - 0.787041, Long 117.231541 P.3 CSR . PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kebutuhan masyarakat yang belum bisa terpenuhi (Pengadaan Sound System langgar Assobirin) ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
77	Pelatihan, Pembinaan dan Pendampingan Bagi Usaha Mikro Olahan Buah, Sayuran dan IKAN	Jalan Ahmad Sifa Rt.13 Kelurahan Dondang lat. 0.772947° - long 117.228593° P. 3 CSR PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kebutuhan masyarakat yang belum bisa terpenuhi (Pelatihatan UMKM Kelurahan Dondang) ,OPD TUJUAN : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
78	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Jalan Ahmad sifa RT.13 Kelurahah Dondang lat. 0.772657° - long 117.228629° P.3 CSR PT Pertamina Hulu Sanga-sanga (PHSS) , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kebutuhan masyarakat yang belum bisa terpenuhi (Pengadaan dan kelengkapan 2 Posyandu Mujair) ,OPD TUJUAN : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
79	Belanja Hibah Lembaga Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Jalan Diponrgoro Rt.006 Kelurahan Dondang Lat 0.525044, Long. 9912981 P. 3 CSR Pertamina Hulu Mahakam (PHM) , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kebutuhan masyarakat yang belum bisa terpenuhi (Pengadaan Sound System langgar AL- Kautsar RT.001) ,OPD TUJUAN : Sekretariat Daerah
80	Belanja Hibah Lembaga Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Jalan Ahmad Sifa RT. 13 kelurahan Dondang lat. 0.772657° - long 117.228629° P.3 CSR PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kebutuhan masyarakat yang belum bisa terpenuhi (Pembuatan Seragam kader posyandu dan pkk Kelurahan Dondang) ,OPD TUJUAN : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
81	Belanja Hibah Lembaga Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Jalan P. Sidirman Rt 005 Kelurahan Dondang lat. 0.79160° - long 117.22517° P. 3 CSR PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kebutuhan masyarakat yang belum bisa terpenuhi (Pengadaan Sound System langgar AL-Hikmah kmelurahan Dondang) ,OPD TUJUAN : Sekretariat Daerah
82	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Jalan Dermawan RT.11 Kelurahan Dondang lat 0.781503, Long.117.222864 P. 4. Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang dilalui untuk kepamakaman rusak parah dan susah dilewati kendaraan (Lanjuta Semenisasi Jalan Dermawan Kelurahan Dondang) ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
83	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Jalan Sulawesi RT,12 / jalan Hidayatullah RT.011 lat 0.779338, Long 117.227979 P.4 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan (Lanjuta Semenisasi Jalan Hidayatullah Kelurahan Dondang) ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
84	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	jalan Antasari Rt.11 dan RT.06 kelurahan Dondang Lat 0.785048, Long 117.226540 P.4 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan (Semenisasi Jalan Antasari RT.11 dan 006 Kelurahan Dondang) ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
85	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Jalan masjid RT,002 Kelurahan Dondang Lat.0.781770, Long 117.235706 P.4 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan (Peningkatan jalan nelayan Jalan nelayan RT.002 Kelurahan Dondang) ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
86	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	jalan masjid Rt.002 /jalan Nelayan Kelurahan Dondang. lat .0.781878, long 117.235684 P. 4 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Penahan derasnya aliran air dan meluapnya air laut yang merendam jalan dan sudah sebagian jalan yang Putus (Pembuatan Turap Jalan nelayan Jalan nelayan RT.002 Kelurahan Dondang) ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
87	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Jalan Air Panas RT.03 Kelurahan Dondang Lat.0.77693° - Long. 117.23495° P. 4. Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan Menuju Tama Pole Rusak dan susah dilalui Kendaraan untuk Masyarakat Dondang Dan tama Pole (Lanjutan Semenisasi Jalan Air Panas RT.03) ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
88	Pembangunan Pos Keamanan di Kecamatan Muara Jawa	Jalan Sulawesi Rt.13 sd jalan gerbang dayaku rt 14 Lat 0.774554, Long 117.227924 -- lat 0.788516, long 117.219614 P. 4 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kebutuhan Keamana Lingkungan Masyarakat Kelurahan Dondang (Pembangunan Pos Kamling 14 RT Kelurahan Dondang) ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
89	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Jalan Haji Jahri RT.06 sd Jalan - jalan Pipaline Rt.01 Lat.0.79208° - Long. 117.22654° P. 4 kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan (Peningkatan Jalan H. Jahri Rt.06 ,jalan tembusan menuju jalan raya Pelita dan tembusan jalan jalur Vico RT.01) ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
90	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Jalan Ahmad Sifa RT.13 kelurahan Dondang Lat.0.77543° - Long. 117.22656° P. 4 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya bangunan yang harus nya menjadi kewajiban yang harus dibangun (Pembuatan gedung Arsip kalurahan Dondang) ,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
91	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Jalan. Ahmad Sifa RT.13 kelurahan Dondang Lat.0.77543° - Long. 117.22656° P. 4 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya bangunan yang harus nya menjadi kewajiban yang harus dibangun (Pembuatan Ruang Perpustakaan Kantor Lurah Dondang) ,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
92	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	jalan Ahmad Sifa RT.13 kelurahan Dondang Lat.0.77543° - Long. 117.22656° P. 4 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya bangunan yang harus nya menjadi kewajiban yang harus dibangun (Pembuatan Ruang Pertemuan Kantor Lurah Dondang) ,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
93	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Jalan Ahmad Sifa Rt.13 kelurahan Dondang Lat.0.77543° - Long. 117.22656° P.4 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya bangunan yang harus nya menjadi kewajiban yang harus dibangun (Pembuatan Toilet Ruang Pertemuan Kantor Lurah Dondang) ,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
94	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Jalan Gerbang Dayaku RT.14 kelurahan Dondang (Lat 0.788321, Long 117.219777) P.4 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang dilalui rusak parah dan susah dilewati kendaraan (Lanjutan Semenisasi Jln Gerbang Dayaku Rt.014) ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

95	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Jalan Pelita RT.001 Kelurahan Dondang (Lat.0.788083° - Long. 117.229873°) P.4 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya bangunan Ruang Guru yang Memadai (Pembangunan Gedung Kantor SDN.005 Kelurahan Dondang) ,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
96	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Jalan pelita RT.001 Ke;lurahan Dondang Lat.0.787877° - Long. 117.229782° P. 4 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Penahan Abrasi air untuk Tidak Longsornya parit (Pembuatan Turap SDN 005 kelurahan Dondang) ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
97	Rehabilitasi Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	jalan pelita RT.001 kelurahan Dondang Lat.0.7881154° - Long. 117.229935° P. 4 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya kantin yang sesuai standar dan Tingkat Kebersihannya yang kurang (Pembuatan kantin sehat SDN 005 Dondang) ,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
98	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Jalan pelita RT.002 kelurahan Dondang Lat.0.47283128° - Long. 117.13511240° P.4 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Bangunan Gedung MI sekolah yang setingkat dengan SD dan perlu perhatian banyak dari instansi terkait (Pembuatan Gedung MI DARUL MUTTAQIN (Pembuatan Gedung MI DARUL MUTTAQIN) ,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
99	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Jalan Air Panas RT.003 Kelurahan Dondang (Lat.0.77722° - Long. 117.23474° P.4 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	perlu adanya perbaikan dan penataan yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Rehap langgar AN'Nur) ,OPD TUJUAN : Bagian Kesejahteraan Rakyat
100	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Jalan Pelita RT.004 kelurahan Dondang Lat 0.792700, Long 117.228095 . P.4 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	perlu adanya perbaikan dan penataan yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Rehap Berat langgar Nur'Ain) ,OPD TUJUAN : Bagian Kesejahteraan Rakyat
101	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Jalan Diponegoro RT.006 Kelurahan Dondang Lat.0.471443876° - Long. 117.132041968° P.4 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Perlunya Perhatian yang sangan penting untuk lingkungan pendidikan ,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
102	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Jalan Ahmad Sifa RT,.13 kelurahan Dondang Lat 0.773134, Long 117.228729 P. 4 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya Mushola untuk kantor kelurahan dondang (Pembangunan Mushola Al-Istiqomah Kantor Kelurahan Dondang) ,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
103	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Jalan Diponegoro RT.006 kelurahan Dondang Lat 0.525044, Long. 9912981 P.4 kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembangunan Renovasi Langgar Al Kautsar Kelurahan Dondang (Pembangunan Renovasi Masjid Al Kautsar RT.06 Kelurahan Dondang + rumah Imam Masjid) ,OPD TUJUAN : Bagian Kesejahteraan Rakyat

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
104	Pembangunan TPS3R dan sarana pendukungnya	Jalan Poros PU Dondang - sanga-sanga RT.013 Lat 525672 Long 9917702 P.4 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Keperluan yang sangat signifiakan bagi setiap daerah untuk penanggulangan sampah (Peningkatan Badan Jalan dan Peningkatan Lokasi Tempat (TPST3R) Sampah) ,OPD TUJUAN : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
105	Pembangunan TPS3R dan sarana pendukungnya	Jalan Poros PU Dondang - Sanga-sanga Rt.13 Kelurahan Dondang Lat 525672 Long 9917702 P.4 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Keperluan yang sangat signifiakan bagi setiap daerah untuk penanggulangan sampah (Work Shop (TPST3R)) Sampah) ,OPD TUJUAN : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
106	Pembangunan TPS3R dan sarana pendukungnya	Jalan Poros Dondang -Sanga-sanga RT.13 Kelurahan Dondang Lat 525672 Long 9917702 P. 4 kelurahan dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Keperluan yang sangat signifiakan bagi setiap daerah untuk penanggulangan sampah (Pengadaan peralatan + Rumah + Toilet (TPST3R)) ,OPD TUJUAN : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
107	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Jalan Petai RT.005 Kelurahan Dondang, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya Stadion Mini untuk meningkatkan prostifitas anak muda dalam bidang olah raga (Pembangunan Stadion Mini Kelurahan Dondang 13.000 m2) ,OPD TUJUAN : Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

108	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jalan Pelita RT.007 Kelurahan Dondang lat 0.790189, long 117.229362 P.4 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya pasar yang bisa menampung baginwarga untuk usaha dilingkungan kel. Dondang (Pembangunan Pasar Dondang berseri Kelurahan Dondang) ,OPD TUJUAN : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
109	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jalan Masjid RT.002 Kelurahan Dondang Lat 0.781849, Long 117.235888 P. 4 Kelurahan dondang, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	beluma adanya pendopo untuk poenyimpanan barang nelayan yang aktif kelaut sebagai tempat yang aman untuk meninggal batang tangkapan (Pendopo Nelayan KUB Dondang Tepian) ,OPD TUJUAN : Dinas Kelautan dan Perikanan
110	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Jalan Diponegoro RT.006 Kelurahan Dondang lat 0.787165, Long 117.225975 P. 4 Keluarahan dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya Fasilitas Puskesmas Pembantu yang memadai bagi masuarakat agar kalau berobat tidak jauh (Puskesmas Pembantu Kelurahan Dondang) ,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
111	Pembangunan TPS3R dan sarana pendukungnya	Jalan Ahmad Sifa rt.13 Kelurahan Dondang Lat.0.77543° - Long. 117.22656° P. 4 Keliurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	untuk kegiatan yang sangat penting bagikebersihan lingkungan ke;urahan dondang (Mobil Angkutan Sampah PS 120 dan Izusu Elp) ,OPD TUJUAN : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
112	Pengadaan ambulans desa darat dan air	jalan Ahmad Sifa Rt.13 kelurahan Dondang Lat.0.77543° - Long. 117.22656° P. 4 kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	untuk kegiatan yang sangat penting bagikebersihan lingkungan ke;urahan dondang (Mobil Ambulance Lengkap dengan Fasilitas P3K Emergency Merk Suzuki APV) ,OPD TUJUAN : Dinas Kesehatan
113	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jalan Gerbang Vico RT.09 Kelurahan Dondang Lat.0.78177° - Long. 117.22140° P.4 kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	untuk angkutan gratis masyarakat kelurahan dondang untuk berobat (Pembuatan Pagar Pemakaman Muslimin Kelurahan Dondang 600 Meter) ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
114	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Muara Jawa	Jalan Ahmad Sifa Rt.13 kelurahan Dondang Lat.0.77543° - Long. 117.22656° P.4 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	sebagai bukti kepedulian masyarakat untuk memadamkan api apa bila ada kebakaran (Pembangunan Posko Balakarcana Kelurahan Dondang) ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
115	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Mesin Pompa, Selang, Nozle, Conection, baju tahan panas, sepatu, helm) (Karhutla)	jalan Ahmad sifa Rt.13 Kelurahan dondang Lat.0.77543° - Long. 117.22656° P. 4 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	kendaraan yang sangan di perlukan saat adanya kebakaran yang jauh dari jangkauan masyarakat (Mobil Pemadam Kebakaran/Fire Truck-JA 4000 L) ,OPD TUJUAN : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
116	Penyediaan Kapal/Perahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT	KUB Se kelurahan Dondang Jalan Ahmad Sifa Rt.13 kelurahan Dondang Lat 0°78607° Long 117.23124° P. 4 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	usulan kelompok Nelayan yang sudah memiliki legalitas Kelompok nalayan dan membutuhkan sarana dan prasarana tangkapan ikan (Pengadaan Perahu Ketinting , Panjang 7 meter,Pengadaan Mesin (13 PK) dan Pengadaan Coolbox Ikan 80 kg 7 KUB. Se kelurahan Dondang) ,OPD TUJUAN : Dinas Kelautan dan Perikanan
117	Penyediaan perlengkapan Jalan (LPJU)	Se kelurahan Dondang dari Rt1 sd. Rt.14 Lat 0°46'49.6° Long 117°13'18.9° P.4 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	perlu adanya penerangan jalan yang sangat penting karena di sepanjang jalan kelurahan dondang gelap dimalam hari (Penerangan Lampu Jalan (PJU) LED Solar Power 100 Watt + Tiang) ,OPD TUJUAN : Dinas Perhubungan
118	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jalan Diponegoro Rt.006 kelurahan dondang Lat.0.78698° - Long. 117.22229° P.4 kelurahan dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Untuk Kepentingan Pendidikan agar lebih maju dan berkualitas (Pengurukan Halaman Kantor SPNF-SKB Muara Jawa Kel. Dondang) ,OPD TUJUAN : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
119	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	jalan Ahmad sifa Rt.13 Kelurahan dondang Lat.0.77543° - Long. 117.22656° P. 4 kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	apabila hujan area kantor kelurahan Banjir dan arus air merendam banguna kantor (pembuatan Turap Pengendali Banjir Kantor Kelurahan Dondang Tinggi 2,5 M Panjang 150 Mater) ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

120	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Jalan ahmad Sifa rt.13 Kelurahan Dondang Lat.0.77543° - Long. 117.22656° , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	apabila hujan area kantor kelurahan Banjir dan arus air merendam banguna kantor (PembuatanDraenase Pengendali Banjir Kantor Kelurahan Dondang) ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
121	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jalan Pelita RT.001 kelurahan Dondang Lat.0.472920668° - Long. 117.133981972° P. 4 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	unyuk meningkatkan efesian keaktifan guru pengajar dikelurahan dondang (Rehabilitasi Rumah Tinggal Guru SMP N.2 Muara Jawa Kelurahan Dondang 6 x 24 Meter) ,OPD TUJUAN : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
122	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jalan Air Panas Rt.003 kelurahan Dondang Lat .0.7731255° , Long 117.2287015° P. 4 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	unyuk meningkatkan efesian keaktifan guru pengajar dikelurahan dondang (Pemagaran PAUD Mujair RT.003 Dondang P : 200 M T: 1,5)M ,OPD TUJUAN : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
123	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jalan Diponegoro RT.006 kelurahan Dondang Lat.0.471675104° - Long. 117.134074528° P.4 kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	unyuk meningkatkan efesian keaktifan guru pengajar dikelurahan dondang (Pemagaran TK Bhinneka Dondang P : 200 M T: 1.5 M) ,OPD TUJUAN : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
124	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	RT 08 (0°52'35"S 117°12'31"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi lapangan yang tidak baik, sehingga perlu adanya Pengurukan Lapangan Bola Handil 9 (P1 Kelurahan),OPD TUJUAN : Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

125	Pembangunan Pos Keamanan di Kecamatan Muara Jawa	RT 16 (0°52'24"S 117°12'28"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya gapura sehingga perlu adanya Pembuatan Gapura RT 16 (P1 Kelurahan),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
126	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	RT 01 (0°52'12"S 117°12'31"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Airhujan yang masuk kedalam kantor sehingga perlu adanya Pembutan Kanopi Kantor Lurah (P1Kelurahan) ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
127	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 016 (0°52'20"S 117°12'17"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang masih kecil dan belum rata sehingga perlu adanya Peningkatan Badan Jalan RT 16(P1 Kelurahan),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
128	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	RT 17 (0°52'39"S 117°12'36"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Bangunan lama yang sudah tidak layak sehingga perlu adanya Pembangunan Posyandu Tengiri (P1 Kelurahan),OPD TUJUAN : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
129	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Bahagia RT.01Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°51'25"S 117°14'43"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi jalan rusak (Peningkatan Jalan Gang Bahagia RT.01) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
130	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Pusaka RT.25 Kelurahan Muara Jawa Pesisir(0°49'42"S 117°14'37"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan Rusak (Peningkatan Jalan Gang Pusaka RT.25) Kelurahan Muara Jawa Pesisir P1,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
131	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Al-qodiri RT 26 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'38"S 117°14'52"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalantidak rata dan Rusak (Peningkatan Jalan Gang Al-qodiri RT 26) Kelurahan Muara Jawa Pesisir P1,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
132	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Sidik RT.11 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'37"S 117°14'26"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi jalan rusak dan Berlobang (Peningkatan Jalan Gang Sidik RT.11) Kelurahan Muara Jawa Pesisir (P1),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
133	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Restu RT.31 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'48"S 117°14'58"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum tersedia Jembatan (Pembuatan Jembatan Gang Restu Tembus Gang Langgar RT.31) Kelurahan Muara Jawa Pesisir (P1),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
134	Pembangunan Saluran Gorong- gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Gang Jumran RT.04 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'50"S 117°14'58"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Saluran yang belum normal, sehingga perlu adanya (Pembuatan cor Beton parit perbatasan antara.RT.04 dan RT.03) Kelurahan Muara Jawa Pesisir (P1),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
135	Pembangunan dan Perbaikan MCK Umum/Komunal Kecamatan Muara Jawa	Jalan Teluk Ladang RT.23 (0°50'07"S 117°13'54"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Warna Pagar Sudah Pudar (Pengecetan pagar Kantor Lurah Muara Jawa Pesisir RT.23) P1,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
136	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Jalan Teluk Ladang RT.23 (0°50'07"S 117°13'54"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Halaman Kantor sering banjir saat hujan (Pemasangan Paving Halaman Kantor Lurah Muara Jawa Pesisir RT.23) P1,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
137	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Gang Bahagia RT. 01 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°51'25"S 117°14'43"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Saluran yang belum normal, sehingga perlu adanya (Cor Beton Parit Gang Bahagia RT. 01 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (P2),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
138	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Gang Bintang RT. 02 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°51'10"S 117°14'28"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Saluran yang belum normal, sehingga perlu adanya (Pembuatan parit Gang Bintang RT. 02) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
139	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Jl. Muslimin RT.02 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°50'01"S 117°14'57"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering terjadi banjir saat hujan (Semenisasi parit Jl. Muslimin RT.02)P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
140	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Bosowa tembus jalur RT.03 Kelurahan Muara Jawa Pesisir(0°49'55"S 117°14'54"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi jalan belum tersedia dan perlu adanya (Pengurukan jalan Gang Bosowa tembus jalur RT.03) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
141	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Muara Jawa	Gang Bosowa RT.03 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'55"S 117°14'54"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pusban Belum ada Pagarnya sehingga perlu (Pembuatan Pagar Keliling untuk Pusban Gang Bosowa RT.03) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
142	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	gg jumran RTR.04 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'51"S 117°14'57"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan belum tersedia jd perlu adanya (Pembuatan Badan jalan gg jumran RTR.04) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
143	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Gg. Langgar RT.05 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'45"S 117°14'53"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Saluran yang belum normal, sehingga perlu adanya (Semenisasi Parit Beton Gg. Langgar RT.05)Kelurahan Muara Jawa Pesisir,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
144	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Gang Langgar RT.05 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'46"S 117°14'56"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Saluran yang belum normal, sehingga perlu adanya (Semenisasi Parit PHM RT.05) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
145	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Merak RT.06 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'44"S 117°14'56"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Peningkatan Jalan Gang Merak RT.06) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
146	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Gang Camar RT.06 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'42"S 117°14'59"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan Rusak (Peningkatan Jalan Gang Camar RT.06) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
147	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Garuda RT. 07 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'42"S 117°15'00"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Peningkatan Jalan Gang Garuda RT. 07) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
148	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Jalan Tahir RT 6,7 dan 8 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'41"S 117°14'59"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Parit Buntu sering jerjadi banjir saat air pasang (Normalisasi parit Jalan poros Dari RT 6,7 dan 8) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

149	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Alqodiri RT.08 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'38"S 117°14'52"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan berlubang (Peningkatan Badan Gang Alqodiri RT.08) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
150	Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) di Kecamatan Muara Jawa	Jalan Tahir RT.08 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'38"S 117°14'52"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Bangunan belum ada Atap (Pengadaan Atap TK TPA Al-Qadar) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
151	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	blok 2 gang alhikmahRT.09 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'44"S 117°14'44"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Saluran yang belum normal, sehingga perlu adanya (Cor Beton Parit dari blok 2 gang alhikmah menuju parit induk jalan A. Yani) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
152	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	RT.09 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'39"S 117°14'49"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering banjit sAat hujan (Cor Beton Parit dari blok 4 gang alhikmah menuju gang josch) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
153	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Blok 8 RT.10 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'44"S 117°14'46"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi jalan rusak (Peningkatan badan jalan Blok 10 RT.10) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
154	Pembangunan dan Perbaikan MCK Umum/Komunal Kecamatan Muara Jawa	gg alhikmah di blok 4 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'47"S 117°14'45"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Perbaikan sarana olah raga/ lapangan gg alhikmah di blok 4 Kelurahan Muara Jawa Pesisir,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
155	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Maskur RT. 19 0°49'6.80"S 117°13'51.55"T, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	kondisi jalan rusak(Peningkatan Badan Jalan Gang Maskur 4 Blok 2 RT.19) ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
156	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Sumber Air RT. 19 0°49'7.70"S 117°13'54.29"T, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Peningkatan Badan Jalan Gg. Sumber Air RT.019),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
157	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Padat .Karya RT. 18 0°48'50.73"S 117°13'56.54"T, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Lanjutan Pembuatan Drainase Parit Padat Karya RT. 18),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
158	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Maskur RT. 19 0°49'4.52"S 117°13'53.84"T , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Pengaspalan Gang Maskur RT. 19),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
159	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Tower RT.20 0°49'26.17"S 117°13'55.52"T, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Semenisasi Gang Tower RT. 20),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
160	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Sayang RT. 21 0°49'41.54"S 117°13'57.92"T, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi jalan rusak Peningkatan Lanjutan Jalan Gang Sayang RT. 21,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
161	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	rt 01 jl. hasbullah, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Lanjutan Semenisasi Jalan Hasbullah Menuju Jalan Berkah RT 01 Kelurahan Tama Pole (- 0,7686940, 117,2455037) -P1,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
162	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Rinjani RT.25 117°13'57.92"T 117°14'16.67"T, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Lanjutan Semnisasi Gang Rinjani RT. 25,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
163	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Hj. Sehe RT. 26 0°49'23.64"S 117°14'32.90"T, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak Semenisasi Gang Hj. Sehe RT.26 ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
164	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Jl. Sultan Himayatuddin Sampai Kegalendrong RT. 28 0°49'32.59"S 117°13'22.71"T, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak Semenisasi Jl. Sultan Himayatuddin sampai Kegalendrong ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
165	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	rt 2 jl. suka damai, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Peningkatan Jalan Berkah menuju Jalan Ban 2 RT. 01 (-0,7663064, 117,2501151) -P,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
166	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	rt. 1 , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembuatan Jalan TPQ Arrahman RT. 01 (- 0,7677855, 117,2463757) -P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
167	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	rt 01, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembuatan Jalan Area kuburan Muslimin RT 01 (-0,7671636, 117,2429435) -P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
168	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Tepian RT. 28 0°49'21.66"S 117°13'44.64"T, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Semenisasi Gang Tepian Sampai Sungai Tepian),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
169	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	jl. nusantara, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembuatan Turap Sungai Jalan Nusantara RT. 01 (-0,7702375, 117,2445210)-P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
170	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Tanjung Perak RT. 29 0°49'15.70"S 117°13'52.50"T, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Peningkatan Badan Jalan (Gang Tanjung Perak RT. 29),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
171	Fasilitasi sarana prasarana desa	sd 015 tama pole, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembuatan Gapuran SD.N 015 Rt. 01 (- 0,7705674, 117,2448596)- P2,OPD TUJUAN : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
172	Fasilitasi sarana prasarana desa	sd 015, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pemasangan Paving Blok Halaman SD.N 015 RT. 01 (-0,7705674, 117,2448596) -P2,OPD TUJUAN : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
173	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	rt 01, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Semenisasi Jalan Gang Gilingan Padi RT. 01 (- 0,7669306, 117,2471073) -P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
174	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Hasan RT. 30 0°49'23.44"S 117°14'44.50"T, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Gang Hasan RT. 30),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
175	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	rt 01, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Normalisasi Saluran Air Sungai RT. 01 (- 0,7701118, 117,2444294) - P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
176	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Jalan Damai RT. 30 0°49'21.45"S 117°14'44.23"T, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Semenisasi Jalan Damai RT. 30),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

177	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	rt 2 handil gemuk, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Normalisasi Sungai dari simpang 3 kesimpang 4 Jalan Handil Gemuk Rt. 01 (-0,7691500, 117,2534675) -P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
178	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	simpang cermin rt 02, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Semenisasi Jalan Cermin menuju arah Jalan Suka Damai RT.2 (-0,7815788, 117,2532747) -P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
179	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Ardian 1 RT. 31 0°48'56.51"S 117°14'7.35"T, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Peningkatan Badan Jalan Gang Ardian 1 RT. 31),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
180	Fasilitasi sarana prasarana desa	rt 02 suka damai, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembuatan Gapura Tapal Batas antara kelurahan Tama Pole menuju Kelurahan Muara Kembang (- 0,7595327, 117,2551717) -P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
181	Fasilitasi sarana prasarana desa	rt 2, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembuatan Gapura Tapal Batas antara kelurahan Tama Pole RT.2 menuju handil batuah Kelurahan Muara Kembang (-0,7767664, 117,2826670) - P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
182	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	rt 02 suka damai, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembuatan Jembatan Tambatan Perahu RT 2 (- 0,7801353, 117,2830335) -P2,OPD TUJUAN : Dinas Kepemudaan dan Olahraga
183	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pengadaan Pupuk Sawit/Ha)	RT. 04 Handil Sulawesi kelurahan Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Untuk Meningkatkan Hasil Produksi Maka Perlu tersedianya Pupuk bersubsidi (Poktan Karya Bersaudara Satu Muara Kembang),OPD TUJUAN : Dinas Perkebunan

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
184	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pengadaan Pupuk Sawit/Ha)	Handil Sulawesi RT.04 Kelurahan Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Untuk Meningkatkan Hasil Produksi Maka Perlu tersedianya Pupuk bersubsidi (Poktan Tunas Harapan Muara Kembang),OPD TUJUAN : Dinas Perkebunan
185	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pengadaan Pupuk Sawit/Ha)	RT.09 Kelurahan Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Untuk Meningkatkan Hasil Produksi Maka Perlu tersedianya Pupuk bersubsidi (Poktan Jalur Mulyo Muara Kembang),OPD TUJUAN : Dinas Perkebunan
186	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	RT.05 Kelurahan Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Untuk Memperlancar proses distribusi panen hasil pertanian maka perlu dibangunnya jalan (Peningkatan jalan usaha tani Kelompok Sinar Mandiri Muara Kembang),OPD TUJUAN : Dinas Perkebunan
187	Pelatihan, Pembinaan dan Pendampingan Bagi Usaha Mikro Olahan Buah, Sayuran dan IKAN	Kelurahan Tama pole, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Program UMKM Pelatihan Pembuatan Hasil Laut RT. 1,2.3 (-0,7745548, 117,2581536) P2,OPD TUJUAN : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
188	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 19 (0°52'21"S 117°13'46"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang belum disemen, sehingga perlu adanya Lanjutan Peningkartan Badan Jl. Martadinata ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
189	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	kelurahan tama pole, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pengadaan Tenda Kerucut PKK Kelurahan Tama pole (-0,7745548, 117,2581536),OPD TUJUAN : Dinas Kepemudaan dan Olahraga
190	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 13 (0°52'44"S 117°12'56"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang belu disemenisasi sehingga perlu adanya Lanjutan Peningkartan Badan Jl. Sukarelawan ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
191	Fasilitasi sarana prasarana desa	Kelurahan Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pengadaan Set Peralatan masak PKK Kelurahan Tama Pole (-0,7745548, 117,2581536),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
192	Fasilitasi sarana prasarana desa	Kelurahan Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pengadaan Tenda Acara PKK Kelurahan Tama pole (-0,7745548, 117,2581536),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
193	Penyediaan Benih Ikan / Udang	Kelurahan Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pengadaan Bibit Ikan Nila Kel. Tama Pole (- 0,7745548, 117,2581536),OPD TUJUAN : Dinas Kelautan dan Perikanan
194	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Wali RT.11 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'37"S 117°14'25"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Peningkatan Jalan Gang Wali RT.11) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
195	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Sepakat RT. 11 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'42"S 117°14'18"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan rusak (Peningkatan Jalan Gang Sepakat RT. 11) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
196	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Jalan A Yani RT. 11 dan RT.12 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'39"S 117°14'37"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering terjadi banjir saat hujan (Pembuatan Parit Perbatasan antara RT. 11 dan RT.12) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
197	Fasilitasi sarana prasarana desa	sd 015, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pengadaan dan Pemasangan Paping Blok SDN 015 Kel. Tama Pole (-0,7705674, 117,2448596) P1,OPD TUJUAN : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
198	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 01 (0°52'18"S 117°12'33"E, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang belum disemenisasi sehingga perlu adanya Lanjutan Peningkatan Badan jalan Gg. Mawar Kelurahan Muara Jawa Ilir ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
199	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Palam RT.12 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°50'31"S 117°14'40"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Peningkatan Badan Jalan Gang Palam RT.12 Kelurahan Muara Jawa Pesisir,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
200	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 02 (0°52'14"S 117°12'48"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang belum disemen, sehingga perlu adanya Lanjutan Peningkatan badan Jalan Gang Mahkota Dewa ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
201	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	RT 02 (0°52'12"S 117°12'51"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya turap, sehingga perlu adanya pembuatan Turap Parit RT 02 Kelurahan Muara Jawa Ilir ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
202	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	RT. 03 (0°52'19"S 117°13'39"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya turap, sehingga perlu adanya pembuatan Turap Sungai Jl. Martadinata Rt 3 ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
203	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Gang Persatuan RT.12 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'42"S 117°16'01"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Banjir saat Hujan (Normalisasi Parit Gang Persatuan RT.12) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
204	Rehabilitasi Jalan Menuju Akses Pendidikan,Kesehatan, Wisata dan Jalan Produksi Kabupaten	Muara Pegah Kelurahan Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Tidak Tersedianya Fasilitas Dermaga yang memadai diwilayah Kampung Wisata Muara Pegah Kelurahan Muara Kembang. ,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
205	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 03 (0°52'20"S 117°13'43"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya jembatan beton, sehingga perlu adanya Pembuatan Jembatan Beton Jl. Martadinata Rt.3 ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
206	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 03 (0°52'19"S 117°13'38"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum normalnya saluran air kebun sehingga perlu adanya Normalisasi Parit Kebun RT 03 Kelurahan Muara Jawa Ilir ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
207	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	RT 04 (0°52'18"S 117°12'39"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya parit beton, sehingga perlu adanya Penurapan Parit di Jalan Pelita Perbatasan di Rt 20 Dan Rt 04 ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
208	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Jl. Husni Thamrin RT.15, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jembatan GG.Biru Rusak dan Perlu diganti jadi Jembatan Beton,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
209	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Jl.Husni Tamrin RT.15, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan GG. Biru 2 Sempit dan perlu pelebaran,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
210	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Jl. Husni Tamrin RT.15, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan GG. Bidan sempit dan perlu pelebaran,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
211	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 05 (0°52'47"S 117°12'41"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang masih rusak, sehingga perlu adanya Lanjutan Peningkatan badan Jalan Merdeka ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
212	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 017 (0°52'39"S 117°12'38"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jembatan yang belum permanen, sehingga perlu adanya Pembuatan Jembatan Gang Miftahul Ulum ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
213	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	RT 06 (0°52'55"S 117°13'35"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya turap, sehingga perlu adanya Pembuatan Turap Sungai Kiri Kanan RT 06 ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
214	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 06 (0°52'50"S 117°13'18"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya jembatan, sehingga perlu adanya Pembuatan Jembatan menuju Kebun RT 06 Kelurahan Muara Jawa Ilir ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
215	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 06 (0°52'55"S 117°13'33"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum ratanya jalan, sehinggab perlu adanya Pengurukan Turap RT 06 ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
216	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Mulyo Blok A RT.13 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'46"S 117°14'07"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Peningkatan Badan Jalan Gang Mulyo Blok A RT.13) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
217	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Sahabat RT. 13 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'40"S 117°14'05"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Peningkatan Badan Jalan Gang Sahabat RT. 13) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
218	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gg Nauli Blok A Rt 32 0°48'45.17"S 117°13'53.89"E, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	kondisi jembatan sudah rusak (Pembuatan Jembatan Gg Nauli Blok A RT 32),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
219	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Jln.M.Hatta RT.14 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'52"S 117°13'57"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering banjir pada saat hujan (Semenisasi Parit dari Gang Rahayu tembus Gang Wahyu RT.14) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
220	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	RT 07 (0°52'09"S 117°12'36"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya turap, sehingga perlu adanya Pembuatan Turap parit Rt. 7 Jl. Martadinata ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
221	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Jalan Tembus Gang Ardian Sampai Gang Hijrah RT. 31 0°48'52.65"S 117°14'5.22"T , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Pembuatan Badan Jalan Tembus Gang Ardian Sampai Gang Hijrah),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
222	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 07 (0°52'00"S 117°12'38"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang belum disemen sehingga perlu adanya Lanjutan Peningkatan badan Jalan Gg. Hibrida,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
223	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 07 (0°52'00"S 117°12'38"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya jembatan sehingga perlu adanya Pembuatan Jembatan Gang Hibrida Rt.7 Jl. Martadinata ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
224	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Ardian Menuju Jalur Pipa RT.31 0°48'56.08"S 117°14'10.98"T, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Semenisasi Gang Ardian Menuju Jalur PipaRT. 31),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
225	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 07 (0°52'00"S 117°12'38"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya parit sehingga perlu adanya Pembuatan Drainase Parit Gg. Hibrida Jl. Martadinata Rt.7 ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
226	Ruang Terbuka Non Hijau di perkotaan (Paving, Rabat/Semenisasi)	RT 07 (0°52'09"S 117°12'34"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya tempat terbuka atau icon Kelurahan sehingga perlu adanya Pembuatan Taman RT 07 ,OPD TUJUAN : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
227	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Sepakat RT.32 0°48'48.09"S 117°13'59.14"T, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Semenisasi Gang Sepakat RT. 32),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
228	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Suri RT. 34 0°48'51.68"S 117°14'13.94"T, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Semenisasi Gang Suri RT.34),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
229	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Suri 2 RT. 34 0°48'51.00"S 117°14'14.79"T, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Semenisasi Gang Suri 2 RT.34),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
230	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Sukri RT. 34 0°48'51.73"S 117°14'15.38"T, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Semenisasi Gang Sukri RT. 34) P1 Kecamatan,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

231	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Sambi RT. 35 0°49'14.10"S 117°14'10.99"E, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Semenisasi Gang Sambi RT. 35),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
232	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 01 (0°52'18"S 117°12'32"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang belum disemenisasi, sehingga perlu adanya Semenisasi Gang Belimbing Kelurahan Muara Jawa Ilir ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
233	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 02 (0°52'16"S 117°12'48"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	jalan yang masih rusak, sehingga perlu adanya Sambungan Semenisasi Gang Palem ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
234	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	RT 04 (0°52'25"S 117°12'36"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	belum adanya pagar, sehingga perlu adanya Pembuatan Pagar Langgar Nurul Hikmah Kampung Jawa ,OPD TUJUAN : Bagian Kesejahteraan Rakyat
235	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	RT 04 (0°52'21"S 117°12'38"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya parit permanen sehingga perlu adanya Pemasangan Turap Parit di Jalan Pelita Handil 8 Kampung Jawa Samping Rumah Bapak Sujangi ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
236	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	RT 08 (0°52'35"S 117°12'31"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya parit beton, sehingga perlu adanya Pembuatan parit beton Jalan Lapangan Bola ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
237	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 17 (0°52'38"S 117°12'33"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan masih berlubang, sehingga perlu adanya Pengaspalan Gang Akasia ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

238	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 09 (0°52'35"S 117°14'28"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jembatan yang sudah rusak, sehingga perlu adanya Pembabgunan Jembatan Rt. 09 Kel. Mji ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
239	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 09 (0°52'26"S 117°14'00"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	jalan yang becek dan berlubang, sehingga perlu adanya Peningkatan Badan Jalan Martadinata Rt.09 Kel. Mji ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
240	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	RT 10 (0°52'19"S 117°12'41"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya parit, sehingga perlu adanya pembuartan Parit Lanjutatan Gang Cempaka ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
241	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 10(0°52'20"S 117°12'43"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	jalan yang masih sempit, sehingga perlu adanya Pelebaran Jalan Gang Bersatu ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
242	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Rahmah Blok A RT. 38 0°49'51.35"S 117°13'53.41"T, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Peningkatan Badan Jalan Gang Rahman Blok A RT. 38),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
243	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 10(0°52'16"S 117°12'42"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	jalan yang rusak, sehingga perlu adanya Pengaspalan Lannjutan Gang Cempaka ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
244	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Assalam RT.39 , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (semenisasi Gang Assalam RT. 39),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

245	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Raudah RT. 39 0°49'54.44"S 117°13'51.35"T, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Semenisasi Gang Raudah RT. 39),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
246	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	RT 11 (0°52'16"S 117°13'19"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	belum adanya turap, sehingga perlu adanya Turap Sungai Jl. Martadinata RT 11 ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
247	Pembangunan Saluran Gorong- gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	RT 11 (0°52'15"S 117°13'16"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	belum adanya gorong-gorong sehingga perlu adanya Pembuatan Gorong-gorong Pipa Untuk 4 Parit Kebun ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
248	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Permai RT. 39 0°49'33.95"S 117°14'15.78"T, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Melanjutkan Semenisasi Gang Permai RT. 39),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
249	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Reformasi RT. 13 0°49'33.47"S 117°14'8.24"T, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Lanjutan Drainase Gg. Reformasi RT. 13),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
250	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 11 (0°52'17"S 117°13'25"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jembatan kayu yang sudah rusak, sehingg perlu adanya Pembuatan Jembatan RT 11 ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
251	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Masykur RT. 19 0°49'3.67"S 117°13'54.04"T, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering Terjadi Banjir (Drainase Gang Masykur 4 Blok 2 RT.19),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

252	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Mandiri RT. 30 0°49'25.30"S 117°14'49.55"T, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering terjadi Banjir (Drainase Gang Mandiri RT. 30),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
253	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Bersama RT. 35 0°49'13.92"S 117°14'3.61"T, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Seing Terjadi Banjir (Pembuatan Drainase Gang Bersama RT. 35),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
254	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Bersama RT. 35 0°49'15.33"S 117°14'4.91"T, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering Terjadi Banjir (Lanjutan Pembuatan Drainase Gang Bersama Dan Jembatan RT. 35),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
255	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Reformasi RT. 13 0°49'33.17"S 117°14'3.39"T, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering Terajadi Banjir (Lanjutan Drainase Gang Reformasi RT. 13),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
256	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Abimayu RT. 13 0°49'30.97"S 117°14'5.31"T, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering Terjadi Banjir (Drainase Gang Abimayu RT. 13),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
257	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 12 (0°51'59"S 117°12'38"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang masih belum disemenisasi semua, sehingga perlu adanya Peningkatan Jalan Lanjutan Semenisasi Gg. Veteran Rt.12 ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
258	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 12 (0°52'00"S 117°12'38"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	jalan yang belum disemenisasi sehingga perlu adanya Peningkatan Jalan Lanjutan Semenisasi Gg.Tower Rt 12 ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
259	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 13 (0°52'51"S 117°13'20"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum permanennya jembatan, sehingga perlu adanya Pembuatan Jembatan Jl.Sukarelawan ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
260	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	RT 13 (0°52'45"S 117°13'02"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya turap, sehingga perlu adanya Lanjutan Turap Rt.13 ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
261	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	RT 14 (0°52'27"S 117°12'36"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	turap yang masih belum tersambung, sehingga perlu adanya Lanjutan Turap Beton Gang Kamboja ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
262	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 14 (0°52'27"S 117°12'36"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	jalan yang masih sempit sehingga perlu adanya Pelebaran Jalan Gg. Kamboja ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
263	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 15 (0°52'14"S 117°13'08"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jembatan yang masih kayu, sehingga perlu adanya Pembuatan Jembatan Beton RT 15 ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
264	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 16 (0°52'21"S 117°12'27"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang masih labil, sehingga perlu adanya Semenisasi Gang Sawo ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
265	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 16 (0°52'21"S 117°12'27"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya jembatan, sehingga perlu adanya Pembuatan Jembatan Gang Sawo ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
266	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	RT 16 (0°52'24"S 117°12'28"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya saluran air, sehingga perlu adanya Pembuatan Parit Beton RT 16 ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
267	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 18 (0°52'20"S 117°12'45"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jembatan yang masih belum permanen sehingga perlu adanya Pembuatan Jembatan di Gg. Bersatu ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
268	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 18 (0°52'12"S 117°12'47"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Badan jalan yang masih berlubang, sehingga perlu adanya Peningkatan Badan Jalan Gg. Melati ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
269	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	RT 18 (0°52'11"S 117°12'47"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Turap yang belum ada, sehingga perlu adanya pembuatan Turap di Jl. Martadinata RT. 18 ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
270	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	RT 18 (0°52'11"S 117°12'47"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya turap, sehingga perlu adanya Turap di Gg. Kubur Keramat ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
271	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	RT 19 (0°52'21"S 117°13'43"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya turap, sehingga perlu adanya Turap Sungai RT 19 ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
272	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	RT 06 (0°52'58"S 117°13'43"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	tanah yang longsong, sehingga perlu adanya Penurapan Jl. Sukarelawan ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
273	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	RT 18 (0°52'11"S 117°12'45"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	badan jalan yang longsor, sehingga perlu adanya Penurapan Jl. Martadinata ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
274	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Jalan Andi Mukmin Raya RT.15 dan RT 20 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'47"S 117°18'00"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Saluran yang belum normal, sehingga perlu adanya (Normalisasi parit Perbatasan RT.15 dan RT 20) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
275	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	gang Rahmad RT.15 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°46'04"S 117°17'32"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan rusak (Peningkatan Badan Jalan gang Rahmad RT.15) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
276	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Jalan Andi Mukmin RT.16 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'53"S 117°14'06"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering banjir saat hujan (Pembuatan Cor Beton Parit Induk Andi Mukmin RT.16) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
277	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Jalan andi mukmin raya RT.16 dan RT.20 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'53"S 117°14'06"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Saluran pembuangan Belum tersedia (Pembuatan Parit Beton Perbatasan RT.16 dan RT.20) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

TABEL T.C-32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
278	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gg. H. Ramli RT.17 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°51'11"S 117°11'46"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak parah sehingga perlu adanya (Peningkatan Jalan Gg. H. Ramli RT.17) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
279	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gg. Cendana RT.17 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°46'18"S 117°17'30"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi jalan rusak dan belum di cor (Peningkatan Jalan Gg. Cendana RT.17) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
280	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang H.Matnor Rt.18 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°48'46"S 117°12'06"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi jalan Rusak (Peningkatan Jalan Gang H.Matnor Rt.18) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
281	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Gang Ikhlas RT. 18 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°45'43"S 117°16'27"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering banjir saat hujan (Pembuatan Parit Beton Gang Ikhlas RT. 18) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
282	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Belat RT.19 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°45'36"S 117°16'51"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jembatan Rusak (Rehab Jembatan Gang Belat RT.19) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
283	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	RT.10, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Mesjid Al Hidayah perlu perbaikan kondisi rusak,OPD TUJUAN : Bagian Kesejahteraan Rakyat

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
284	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	RT.08, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Bangunan Mesjid Nur Sa'adah sudah banyak mengalami kerusakan sehingga perlu direhab berat.,OPD TUJUAN : Bagian Kesejahteraan Rakyat
285	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 17 (0°52'42"S 117°12'30"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang belum disemen, sehingga perlu adanya Semenisasi Gang Akasia 2 ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
286	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 17 (0°52'39"S 117°12'37"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang belum disemen, sehingga peelu adanya Semenisasi Gang Etam ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
287	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Jira RT. 19 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°48'48"S 117°15'53"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Penurapan Jalan Gang Jira RT. 19) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
288	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 14 (0°52'28"S 117°12'40"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang masih belum stabil, sehingga perlu adanya Peningkatan badan jalan Gg. sejahtera ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
289	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	RT 20 (0°52'11"S 117°12'37"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Turap Beton Saluran Drainase (Parit) Belakang MTS tembus jalan Pelita ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
290	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Rawa Indah Blok A RT.20 (Lanjutan) Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'55"S 117°14'05"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Peningkatan Jalan Gang Rawa Indah Blok A RT.20 (Lanjutan) Kelurahan Muara Jawa Pesisir,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

291	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	RT 20 (0°52'11"S 117°12'37"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembuatan Drainase Jalan Mawar Samping Masjid Kelurahan Muara Jawa Ilir ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
292	Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) di Kecamatan Muara Jawa	GG. Nur sa'adah RT.15, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Bangunan TPA Nur Sa'adah masih berupa kayu dan banyak yang lapuk,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
293	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 14 (0°52'29"S 117°12'42"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jembatan Gang Sedulur ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
294	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Gg. Rawa Indah Blok A. RT. 20 (Lanjutan) Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'55"S 117°14'05"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering banjir saat hujan (Semenisasi Parit Gg. Rawa Indah Blok A. RT. 20 (Lanjutan) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
295	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jl. Mahakam Tengah RT.05, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum tersedianya Knopi PAUD Al-Istiqamah, ,OPD TUJUAN : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
296	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 14 (0°52'29"S 117°12'42"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Semenisasi Gang Sedulur ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
297	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	RT 16 (0°52'18"S 117°12'32"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya parit, sehingga perlu adanya Pembuatan Drainase Gang Belimbing Kelurahan Muara Jawa Ilir ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
298	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	RT 16 (0°52'25"S 117°12'27"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya pagar dan tempat parkir, sehingga perlu adanya Pembangunan Pagar dan Tempat Parkir Kantor Lurah Muara Jawa Ilir ,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
299	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 09 (0°52'41"S 117°14'25"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Akses jalan yang masik kecil dan terputus, sehingga perlu adanya Peningkatan badan Jalan Lingkar ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
300	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 14 (0°52'29"S 117°12'46"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang belum rata, sehingga perlu adanya Semenisasi Gang Ceria ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
301	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Swakarya RT.21 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'41"S 117°14'36"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Peningkatan Jalan Gang Swakarya RT.21) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
302	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Gang Pusaka dan Gang Swakarya RT.21 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'41"S 117°14'36"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Saluran yang belum normal, sehingga perlu adanya (Drainase Parit Antara Gang Pusaka dan Gang Swakarya RT.21) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
303	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	PGang Ikhlas RT.22 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'37"S 117°14'03"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi jalan rusak (Peningkatan Jalan Gang Ikhlas RT.22) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
304	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 15 (0°52'13"S 117°12'56"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang belum disemenisasi,sehingga perlu adanya Lanjutan Semenisasi Gang Kasturi ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
305	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 15 (0°52'15"S 117°13'09"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	jalan yang masih belum rata, sehingga perlu adanya Peningkatan badan jalan Gang Rambutan ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
306	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Parit Gang Ikhlas RT.22 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'37"S 117°14'03"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering banjir saat hujan (Pembuatan Parit Gang Ikhlas RT.22) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
307	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 15 (0°52'14"S 117°13'05"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang masih labil, sehingga perlu adanya Peningkatan Badan jalan Gg. Semar RT 15 ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
308	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Prestasi	RT 16 (0°52'22"S 117°12'16"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya GOR diKecamatan Muara Jawa, sehingga perlu adanya Pembangunan GOR Mini Kelurahan Muara Jawa Ilir ,OPD TUJUAN : Dinas Kepemudaan dan Olahraga
309	Pembangunan Saluran Gorong- gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Gg. SMK RT. 23 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°50'06"S 117°13'52"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Gorong-gorong yang ada terlalu kecil sehingga aliran air kurang lancar jadi perlu adanya (Penggantian Goroing-Gorong Gg. SMK RT. 23) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
310	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Gang Nol Ke Gang SMK RT. 23 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°50'05"S 117°13'47"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya parit sehingga perlu adanya (Semenisasi parit Gang Nol Ke Gang SMK RT. 23) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
311	Rehabilitasi Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	RT 16 (0°52'25"S 117°12'27"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi bangunan pasar yang sudah tidak layak, sehingga perlu adanya Rehab Berat Pasar Handil 8 Muara Jawa Ilir ,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
312	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Jl. Mahakam Ilir RT.02, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum tersedianya Jembatan Kayu Ulin di RT.02 sehingga menyulitkan Nelayan Untuk mengangkut hasil Nelayan,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
313	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 16 (0°52'24"S 117°12'31"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang masih kecil, sehingga perlu adanya Pelebaran jalan Kuburan Muslimin ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
314	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	JL.Mahakam Ilir GG. Baco RT.02, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum tersedianya jembatan GG. Baco RT.02 sehingga pada saat pasang tenggelam,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
315	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT.15, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan GG.Handil Setia RT.15 sempit dan perlu pelebaran dan peningkatan,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

TABEL T.C-32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
316	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	RT 09 (0°52'34"S 117°14'28"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pintu air yang ada rusak dan tidak berfungsu, sehingga perlu adanya Pembangunan Pintu Air Utama Handil 8 ,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
317	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	RT 06 (0°53'22"S 117°14'18"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pintu air yang rusak dan tiadk berfungsi, sehingga perlu adanya pembuatan Pintu Air Utama handil 9 ,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
318	Pembangunan Saluran Gorong- gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	GG. Handil Setia RT.15, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Tidak saluran air di GG. Handil Setia sehingga air menjadi tergenang di pemukiman warga,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
319	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT. 15, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan masih berupa tanah dan perlu disemenisasi GG. RT.15,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
320	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	RT 03 (0°52'27"S 117°14'03"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya tanggul parit, sehingga perlu adanya pembuatan Tanggul Parit Handil 8 ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
321	Pembangunan Saluran Gorong- gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Jl. Handil Sulawesi RT.04, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Tidak adanya gorong-gorong di Jl. handil sulawesi sehingga pemukiman warga yang tergenang,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
322	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	RT.03, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Untuk menahan badan jalan arah pelabuhan umum agar tidak abrasi di RT.03,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

TABEL T.C-32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
323	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	RT.01, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pelebaran badan jalan RT.1 sehingga perlu diturap dan di tinggikan agar tidak terendam air pasang,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
324	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	RT 06 (0°53'15"S 117°14'12"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya turap sungai handil 9, sehingga perlu adanya pebuatan Tanggul Parit Handil 9 ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
325	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT.01, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan masih berupa tanah, pada saat hujan becek dan licin. Sehingga perlu disemenisasi,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
326	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 09 (0°52'32"S 117°14'28"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	jalan yang masih becek dan berlubang, sehingga perlu adanya Peningkatan Badan jalan Gg. Kambing ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
327	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT.01, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Badan jalan RT.01 dekat jembatan mulai mengalami penurunan, sehingga perlu ditimbun dan ditinggikan lagi.,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
328	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT.14, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum ada jembatan diatas yang ada di RT.14,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
329	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 20 (0°52'15"S 117°12'38"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang tidak rata dan berlubang, sehingga perlu adanya Peningkatan badan jalan Gg.Kenanga ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

330	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT.09, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan GG. Nila RT.09 masih berupa tanah, sehingga perlu disemenisasi,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
331	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT.09, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan di GG. Sejahtera RT.09 masih berupa tanah sehingga perlu disemenisasi,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
332	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT.09, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Parit Handil Gantung mulai mengalami pendangkalan dan banyak di tumbuhi semak belukar, sehingga pada saat hujan pemukan warga kebanjiran. Oleh sebab itu perlu di Normalisasi,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
333	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Muara Jawa	RT 16 (0°52'25"S 117°12'28"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya paving, sehingga perlu adanya Pemasangan Paving Halaman Kantor Lurah ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
334	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	RT 16 (0°52'25"S 117°12'28"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya gedung UMKM, sehingga perlu adanya Pembangunan Gedung UMKM Kelurahan Muara Jawa ilir ,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
335	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	RT 09 (0°52'36"S 117°14'27"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Bangunan yang sudah rusak dan bocor, sehingga perlu adanya Rehap Langgar al Amin Rt 09 Kel. Mji ,OPD TUJUAN : Bagian Kesejahteraan Rakyat
336	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Mesin Pompa, Selang, Nozle, Conection, baju tahan panas, sepatu, helm) (Karhutla)	Jalan Ir. Soekarno RT. 38 0°49'25.52"S 117°14'1.30"T, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum Ada Perlengkapan (Perlengkapan Pemadam kebakaran , Tandon, DLL),OPD TUJUAN : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

337	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	RT 16 (0°52'23"S 117°12'25"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya gedung BPU Kelurahan, sehingga perlu adanya Pembangunan Gedung BPU Kelurahan Muara Jawa Ilir ,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
338	Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) di Kecamatan Muara Jawa	RT 16 (0°52'23"S 117°12'26"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembuatan Gedung TPA Kelurahan Muara Jawa Ilir ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
339	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Ketapang RT.24 (Lanjutan) Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°50'08"S 117°14'49"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan rusak Peningkatan Jalan Gang Ketapang RT.24 (Lanjutan) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
340	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Bungalang RT.24 (Lanjutan) Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°50'08"S 117°14'49"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Peningkatan Badan Jalan Gang Bungalang RT.24 (Lanjutan) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
341	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Gang Pusaka RT. 25 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'42"S 117°14'37"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Saluran yang belum normal, sehingga perlu adanya (Pembuatan Parit Beton Gang Pusaka RT. 25) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
342	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Gang Al-Qodiri RT.26 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'38"S 117°14'52"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Normalisasi Parit Gang Al-Qodiri RT.26 Kelurahan Muara Jawa Pesisir,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
343	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Kedondong RT.27 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'58"S 117°13'55"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi jalan Rusak (Peningkatan Badan Jalan Gang Kedondong RT.27) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
344	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	RT 16 (0°52'22"S 117°12'15"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembutan Gedung Kesenian Kelurahan Muara Jawa Ilir ,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
345	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Wahyu tembus ke Gang Anugrah RT.27 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'56"S 117°13'54"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi jalan rusak (Peningkatan Jalan Gang Wahyu tembus ke Gang Anugrah RT.27) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
346	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Gang Ketapi s/d gang Onthel RT.28 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°50'26"S 117°13'31"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Aliran air tidak lancar karna Parit parit dangkal jadi perlu adanya (Cor Beton Parit dari Gang Ketapi s/d gang Onthel RT.28) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
347	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Onthel Ke Blok H.Acil RT.28 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°50'26"S 117°13'31"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jembatan Belum teredia maka di pandang perlu di adakanya (Pembuatan Jembatan Gang Onthel Ke Blok H.Acil RT.28) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
348	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	RT 20 (0°52'12"S 117°12'40"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Gedung masih pinjam, sehingga perlu Pembangunan Posyandu Belanak ,OPD TUJUAN : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
349	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT.10, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Normalaisasi Parit Palima RT.10 untuk mengatasi banjir di pemukiman warga,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
350	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	RT 19 (0°52'19"S 117°13'35"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	bangunan gedung sudah tidak layak, sehingga perlu Pembangunan Posyandu Baronang ,OPD TUJUAN : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
351	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT.10, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan Palima RT.10 masih berupa tanah sehingga perlu di semenisasi,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
352	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	RT 17 (0°52'38"S 117°12'34"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya parit, sehingga perlu Pembuatan Parit Beton Gg. Pinus RT. 017 ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
353	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 12 (0°52'01"S 117°12'41"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan yang masih berupa tanah, sehingga perlu adanya Peningkatan badan Jalan Gg. Arjuna ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
354	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Kontrak Menuju Gang Bahagia 0°49'22.17"S 117°14'0.74"E, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering Terjadi Banjir (Lanjutan Pembuatan Parit Gang Kontrak Menuju Gang Bahagia RT. 29),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
355	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Zekky Blok 2 RT.01 524637.64 - 9906348.99, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Peningkatan Badan Jalan Gang Zekky Blok 2 RT.01) P1,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

TABEL T.C-32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
356	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Sepakat RT.4 534184.19 - 9905842.50, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Peningkatan Badan Jalan Gang Sepakat RT 4 Kel. Muara Jawa Tengah) P1,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
357	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Handil 6 RT.07, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi jalan Rusak (Lanjutan Paving Halaman Kantor Lurah Muara Jawa Tengah) P1,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
358	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Blok F RT. 37 , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering Terjadi Banjir (Pembuatan Drainase Blok F RT. 37),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
359	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Blok E RT. 37 , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering Terjadi Banir (Pembuatan Drainase Blok E RT. 37),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
360	Pembangunan Saluran Gorong- gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Gang Fauzan RT 11, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Saat hujan deras air meluap karena tidak ada parit (Pembuatan Parit Beton Gang Fauzan RT 11 Kel. Muara Jawa Tengah) P1,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
361	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Blok C RT. 37, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering Terjadi Banjir (Lanjutan Drainase Blok C RT. 37),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
362	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Fauzan RT 11 525818.69 9905150.05, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Saat hujan deras air meluap karena tidak ada parit (Pembuatan Parit Beton Gang Fauzan RT 11 Kel. Muara Jawa Tengah) P1,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
363	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Jalan Pesantren RT.12 521710.81 - 9906006.35, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Saat hujan deras air meluap karena tidak ada parit (Peningkatan Parit Jalan Pesantren RT.12) P1,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
364	Pengadaan Bibit/Tanaman untuk pemulihan lahan jenis Fast Growing (Tanaman yang cepat tumbuh(tanaman buah-buahan, tumbuhan Sengon, pinus, eucalyptus, Acasia crassicarpa, pulai, Alaban, sungkai, ketapang, lamtoro, trembesi, kaliandra)	Para Petani KWT Kecamatan Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	1.kurangnya Modal Bagi Kelompok 2. Kesulitan Untuk Mendapatkan Benih Unggul 3. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang (Kelompok Wanita Tani Nelayan),OPD TUJUAN : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
365	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Nelayan RT.11 526282.33 - 9905073.76, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jembatan Rusak (Perbaikan Jembatan Gang Nelayan RT.11) P1,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
366	Pengadaan Bibit/Tanaman untuk pemulihan lahan jenis Fast Growing (Tanaman yang cepat tumbuh(tanaman buah-buahan, tumbuhan Sengon, pinus, eucalyptus, Acasia crassicarpa, pulai, Alaban, sungkai, ketapang, lamtoro, trembesi, kaliandra)	Jl. Ir. Soekarno Gn. Pasir RT.29 , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	1.kurangnya Modal Bagi Kelompok 2. Kesulitan Untuk Mendapatkan Benih Unggul 3. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang (Petani Solidaritas Indonesia),OPD TUJUAN : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

TABEL T.C-32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
367	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Jalan Abdul Rasyid RT.06 (Titik Koordinat : 522722, 9909606), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Lanjutan Pembangunan Kantor Lurah Teluk Dalam, P1,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
368	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Muara Jawa	Jalan Swadaya RT.04 (Koordinat : 521421, 9911188), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Rehab Kantor LPM,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
369	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Jalan Pelita RT.07 (Koordinat : 521010, 9910642), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Semenisasi Jalan Pelita RT.07 (Jalan masih jalan tanah latrit),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
370	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Jalan Swadaya RT.05 (koordinat : 521666.52, 9911468.49), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembuatan Paret Beton Jalan RT.05,OPD TUJUAN : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
371	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Jalan Swadaya RT.04 (521478.52, 9911266.16), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Lanjutan Paret Beton jalan Swadaya RT.04,OPD TUJUAN : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
372	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan (Perkotaan)	Lingkungan RT.02 dan RT.04 (521335.86, 9911072.20), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembuatan Drainase Paret Beton RT.02 ke RT.04,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
373	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Parit Besar Jalan Karya RT.01, Depan Masjid Al Falah (521346.20, 9911040.75), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Tebing Halaman Depan Pendopo Masjid rawan Longsong,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
374	Perbaikan Pintu Air Tambak	Kelurahan Muara Jawa Ilir (Koord.1. 525109 LAT 9903596 LONG Koord.2. 525199 LAT 9903607 LONG), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya pintu air, sehingga perlu adanya pembuatan Pintu Air Kebun Poktan Kelapa Remaja ,OPD TUJUAN : Dinas Kelautan dan Perikanan
375	Peningkatan Jaringan Irigasi dibawah 1000 Ha	Koord. 524758 LAT 9903712 LONG , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Saluran yang belum normal, sehingga perlu adanya Normalisasi Parit Kebun Poktan Kelapa Remaja ,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
376	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kelurahan Muara Jawa Ilir(Koord.1. 524259 LAT 9902768 LONG Koord.2. 524431 LAT 9902735 LONG), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	belum adanya pintu air, sehingga perlu adanya pembuatan Pintu Air Kebun Poktan Bina Harapan ,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
377	Peningkatan Jaringan Irigasi dibawah 1000 Ha	Muara Jawa Ilir (Koord.524256 LAT 9902768 LONG), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Saluran yang belum baik, sehingga perlu adanya Normalisasi Parit Kebun Poktan Bina Harapan ,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
378	Pelatihan Kelompok Tani (Poktan)	Kelurahan Muara Jawa Ilir (Koord.052190 LAT 9904285 LONG), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	pemeliharaan kebun karet (Berupa Mesin Rumput , 2 Ha I unit mesin Rumput) Poktan Gunung Pelita,OPD TUJUAN : Dinas Pertanian dan Peternakan
379	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pengadaan Pupuk Sawit/Ha)	Muara Jawa Ilir (Koord 524740 LAT 9903628 LONG), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Intensifikasi pemeliharaan kebun kelapa Dalam (berupa pupuk NPK dan Herbisida) Poktan Kelapa Remaja ,OPD TUJUAN : Dinas Perkebunan

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
380	Pelatihan Kelompok Tani (Poktan)	Muara Jawa Ilir (Koord 524766 LAT 9903773 LONG), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	pemeliharaan kebun kelapa Dalam (Berupa Mesin Rumput , (2 Ha I unit mesin Rumput) Poktan Kelapa Remaja ,OPD TUJUAN : Dinas Pertanian dan Peternakan
381	Pelatihan Kelompok Tani (Poktan)	Muara Jawa Ilir (Kood. 00 52' 39,6" 117 12' 38,7"), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pengadaan Alat Panen dan Pasca Panen Karet Poktan Bina Harapan ,OPD TUJUAN : Dinas Pertanian dan Peternakan
382	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Muara Jawa Ilir (koord. 0,86824 : 117,20365), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya jalan yang baik, sehingga perlu adanya Peningkatan jalan usaha tani Jalan Usaha Tani Poktan Ruhui Rahayu 2 ,OPD TUJUAN : Dinas Perkebunan
383	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Keluarga RT.01 524529.34 - 9906311.38, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Peningkatan Badan Jalan Gang Keluarga RT.01) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
384	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	RT.02 524577.68 - 9906061.20, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Peningkatan Badan Jalan RT.02) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
385	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Mata Air RT 4 524194.78 - 9905876.23, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Peningkatan Badan Jalan Gang Mata Air RT 4 Kel. Muara Jawa Tengah) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
386	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Djarwo RT 4 524211.67 - 9905897.29, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Peningkatan Badan Jalan Gang Djarwo RT 4 Kel. Muara Jawa Tengah) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

387	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Darul Fath RT.6 524344.13 - 9905370.75, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Peningkatan Badan Jalan Darul Fath RT.6 Kel.Muara Jawa Tengah) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
388	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Sindang Jaya, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Pembuatan Badan Jalan Tempudau) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
389	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Sindang jaya RT.09 521417.11 - 9906233.19, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak(Peningkatan Badan jalan Kampung Sindang jaya RT.09) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
390	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gg.Abdul Gopur Rt.10 523809.58 - 9904456.80, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Peningkatan badan jalan Gg.Abdul Gopur Rt.10) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
391	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gg.Budiman RT.10 523702.41 - 9904514.29, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Peningkatan badan jalan Gg.Budiman RT.10) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
392	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Sadri RT 13 524051.03 - 9904569.15, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Peningkatan Badan Jalan Gang Sadri RT 13 Kel. Muara Jawa Tengah) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
393	Fasilitasi sarana prasarana desa	Rt 28 Komplek Kantor Lurah Muara Jawa Ulu 0°49'28.64"S 117°14'1.68"E, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kurangnya Pasilitas Wc (Pembuatan WC di Gedung BPU Kel Muara Jawa Ulu sebagai Posko Paskibraka setiap Kegiatan HUT RI) P1 Kec,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum

TABEL T.C-32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
394	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Rt.15 521617.99 - 9905860.07, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Peningkatan Jalan Lingkungan Rt.15) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
395	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Budiotomo 3 RT.16 524899.98 - 9906498.45, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Peningkatan Gang Budiotomo 3 RT.16) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
396	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Gang PLN Rt.16 524998.52 - 9906656.29, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Peningkatan Gang PLN Rt.16) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
397	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Jalan Darul Hijrah , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Peningkatan Jalan Darul Hijrah) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
398	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	RT.07 524120.02 - 9905100.98, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Lanjutan Penimbunan Lapangan Bola Tunas Muda RT.07) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
399	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Jalan Kuburan Muslimin Rt.07 523936.65 - 9905136.04, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Pengaspalan Jalan Kuburan Muslimin Rt.07) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
400	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Handil 5 RT.01 524627.73 - 9906313.92, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Parit Meluap (Peningkatan Parit Belakang SDN 011 Handil 5 RT.01) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
401	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Mulia Rt.02, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Parit Meluap (Peningkatan Parit Gang Mulia Rt.02) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
402	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Wilayah RT.05 521981, 9910664. 522051, 9910795, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Peningkatan Badan Jalan Usaha Tani RT.05 (Jalan masih tanah),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
403	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Syamsu RT. 29 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°50'12"S 117°14'51"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Peningkatan Jalan Gang Syamsu RT. 29) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
404	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Bandeng RT. 29 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°50'12"S 117°14'53"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Peningkatan jalan Gang Bandeng RT. 29) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
405	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Jasa Bakti RT. 30 (Lanjutan) Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'51"S 117°14'51"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Peningkatan Badan Jalan Gang Jasa Bakti RT. 30 (Lanjutan)P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
406	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Tiung Menuju Gang Al Hikmah RT. 30 (Lanjutan) Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'49"S 117°14'51"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan rusak (Peningkatan Jalan Gang, Tiung Menuju Gang Al Hikmah RT. 30 (Lanjutan) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

407	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Gg. Langgar dan Gg.Restu RT.31 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'48"S 117°14'58"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering banjir saat hujan (Pembuatan Parit Antara Gg. Langgar dan Gg.Restu RT.31) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
408	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gg. Restu RT. 31 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'48"S 117°14'58"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi jalan rusak (Peningkatan Badan Jalan Gg. Restu RT. 31)P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
409	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Setia Kawan RT. 32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°50'09"S 117°13'59"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi jalan rusak (Semenisasi Jalan Gang Setia Kawan RT. 32) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
410	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang As-Salam RT.32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°50'13"S 117°14'01"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Parit yg ada belum di cor jadi perlu adanya(Cor beton Parit Gang As-Salam RT.32) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
411	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gg Amanah RT.32 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°50'11"S 117°14'00"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan masih tanah,jadi perlu diadakanya smenisasi jalan (Peningkatan Jalan Gg Amanah RT.32) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
412	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Gang Jasa Bakti RT. 30 (Lanjutan) Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'51"S 117°14'51"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering banjir saat hujan (Pembuatan Parit Gang Jasa Bakti RT. 30 (Lanjutan) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
413	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Belanak RT.29 Kel.Muara Jawa Pesisir (0°50'12"S 117°14'49"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Konmdisi Jembatan Rusak (Pembuatan Jembatan Ulin Gang Belanak RT.29) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
414	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Gang Veteran RT.28 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°50'32"S 117°13'28"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	aliran air tidak lancar karena Parit sering di tumbuhi rumput,maka perlu di adakanya (Cor Beton Parit antara Ponpes dan Gang Veteran RT.28) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
415	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Gang Anugerah RT.27 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'56"S 117°13'54"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering banjir saat hujan (Rehab Parit Beton Gang Wahyu s/d dengan Gang Anugerah RT.27) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
416	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Pusaka RT.25 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'42"S 117°14'37"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembuatan Jembatan Ulin Gang Pusaka RT.25 Kelurahan Muara Jawa Pesisir,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
417	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Rambu, Marka, ZOSS (Zona Selamat Sekolah) dan Paku Marka)	jalan ahmad sifa rt 13 kelurahan dondang Lat.0.77406° - Long. 117.22831° P. 4 kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	lapangan dan halaman yang becek dikala hujan (Pemasangan paving Halaman Sekolah SMKN 1 Muara jawa) ,OPD TUJUAN : Dinas Perhubungan

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
418	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Jalan Ahmad Sifa RT.13 Lat.0.77406° - Long. 117.22831° P. 4 Kelurahan Dondang, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Tergenangnya Halaman dan Sekolah dikala Hujan (Pembuatan Saluran Drainase SMKN 1 Muara Jawa) ,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
419	Pembangunan Pos Keamanan di Kecamatan Muara Jawa	Jalan Pelita RT.07 (521050-9910730), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembangunan Pos Kamling RT.07 (karena belum memiliki Pos Kamling),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
420	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Jalan Ahmad Sifa RT.13 kelurahan Dondang Lat.0.77406° - Long. 117.22831° P. 4 kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya Musholah di Sekolah Yang memiliki Jumlah Murid yang banyak (Pembangunan Musholla SMK N 1 Muara Jawa) ,OPD TUJUAN : Bagian Kesejahteraan Rakyat
421	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Wilayah RT.03 (521399, 9910910), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembangunan Teribun Penonton dan Perbaikan Lapangan Volly Ball,OPD TUJUAN : Dinas Kepemudaan dan Olahraga
422	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Padaelo RT.24 (Lanjutan) Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°50'08"S 117°14'48"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Peningkatan Badan Jalan Gang Padaelo RT.24 (Lanjutan) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
423	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Jalan Pelita RT.004 Sampai jalan Sulawesi RT 13 kelurahn Dondang Lat 0.776161, Long 117.229001 sd lat 0.791448, Long 117.228919 P. 4 Keliurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sangat menghawatirkan apabila hujan deras air meluap kepemukiman warga kelurahan dondang (Pemasangan Calver Box Parit jalan Poros PU) ,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
424	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Gang Emel ke Gang SMK RT. 23 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°50'10"S 117°13'46"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya parit beton, sehingga perlu adanya (Semenisasi Parit Gang Emel ke Gang SMK RT. 23) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
425	Pembangunan Saluran Gorong- gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Jln Tarbiyah RT.22 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'47"S 117°14'03"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembuatan Gorong-Gorong Jln Tarbiyah RT.22 Kelurahan Muara Jawa Pesisir,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
426	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Nikmat RT.21 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'40"S 117°14'35"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Peningkatan Jalan Gang Nikmat RT.21) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
427	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang. Jira RT. 19 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°48'48"S 117°15'53"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jembatan Rusak (Pembuatan Jembatan Gang. Jira RT. 19) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING

TABEL I.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

428	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Gang Kasturi RT. 18 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°45'11"S 117°15'31"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering banjir saat hujan (Pembuatan Parit Beton Gang Kasturi RT. 18) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
429	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Gang H. Ramli menuju Parit induk jln Muslimin RT. 17 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°51'11"S 117°11'46"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	karna blm adanya Parit maka perlu adanya (Cor beton parit dari Gang H. Ramli menuju Parit induk jln Muslimin RT. 17) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
430	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Anyelir RT.15 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'55"S 117°14'05"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Peningkatan Badan Jalan Gang Anyelir RT.15) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
431	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Muara Jawa	Jalan Swadaya RT.04 (521421, 9911188), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembangunan Pagar Halaman Kantor LPM,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
432	Pembangunan Saluran Gorong- gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	gang Josch ujung Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'39"S 117°14'49"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Goroing-gorong belum tersedia (Pembuatan Gorong - gorong beton parit di gang Josch ujung) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
433	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Sulawesi RT.08 Kel.Muara Jawa Pesisir (0°49'39"S 117°14'52"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan rusak dan berlubang (Peningkatan Jalan Gang Sulawesi RT.08) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
434	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Jl. Karya RT.02 (Koordinat : 521346, 9911027), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Penambahan Knopi Teras Masjid Al-Falah,OPD TUJUAN : Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

435	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Muara Jawa	RT.07 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'42"S 117°15'00"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembuatan Gedung Pertemuan Warga RT.07 Kelurahan Muara Jawa Pesisir,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
436	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Gang Merak RT.06 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'44"S 117°14'56"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering banjir saat hujan (Pembuatan parit beton Gang Merak RT.06) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
437	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Langgar RT.05 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'45"S 117°14'53"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Peningkatan Jalan Gang Langgar RT.05) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
438	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	gg jasa bakti RT.04 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'51"S 117°14'51"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi jalan rusak (semenisasi Jalan gg jasa bakti RT.04) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
439	Rehabilitasi Jalan Menuju Akses Pendidikan,Kesehatan, Wisata dan Jalan Produksi Kabupaten	Jalan Swadaya - Simpati RT.05 dan Jalan Pelita RT.01 (Koordinat 521674, 9911477. 521761, 9911526), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Lanjutan Pengaspalan Jalan Lingkar Kelurahan,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
440	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Gang Bahagia RT. 02 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°50'03"S 117°14'57"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sering banjir saat hujan (Pembuatan parit Gang Bahagia RT. 02) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING

TABEL I.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
441	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Banua RT.01 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°50'14"S 117°14'52"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan rusak (Peningkatan Badan Jalan Gang Banua RT.01) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
442	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Jalan Pelita RT.07 (koordinat : 521034, 9910675), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Peningkatan Badan Jalan Kuburan Muslimin RT.07,OPD TUJUAN : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
443	Rehabilitasi Jalan Menuju Akses Pendidikan,Kesehatan, Wisata dan Jalan Produksi Kabupaten	Jalan Karya RT.03 (Koordinat : 521416, 9910990. 521913, 9910512), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pengaspalan Badan Jalan Karya RT.03,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
444	Rehabilitasi Jalan Menuju Akses Pendidikan,Kesehatan, Wisata dan Jalan Produksi Kabupaten	Jalan Abdul Rasyid RT.06 (koordinat: 522416, 9909901. 522767, 9910166), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Peningkatan Badan jalan Handil Hayung RT.06,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
445	Pembangunan Saluran Gorong- gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Jalan Pelita RT.01 (Koordinat : 521241, 9911005. 521175, 9910928), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembuatan Gorong Gorong Jalan RT.01 (2 buah),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
446	Pembangunan Saluran Gorong- gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Wilayah RT.02 dan RT.04 (koordinat :521534, 9911121. 521484, 9911063), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembuatan Gorong Gorong Jalan Gang Bugis (2 buah),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
447	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Jalan Simpati RT.05 (Koordinat : 521782, 9911512, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembangunan Turap Beton pinggir jalan Simpati RT.05,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

448	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Jalan Swadaya RT.05 (koordinat : 521541, 9911335), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pelebaran Jalan Swadaya RT.05,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
449	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Jalan Karya RT.03 (koordinat : 521416, 9910990. 521830, 9910623), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pelebaran Badan Jalan Karya RT.03,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
450	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Jalan Pelita RT.01 (Koordinat : 521234, 9910998, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pelebaran Badan jalan Pelita RT.01,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
451	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Jalan Swadaya RT.02 (koordinat : 521339, 9911108. 521389, 9911159), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Peningkatan Parit sisi Jalan Swadaya RT.02,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
452	Pembangunan Saluran Gorong- gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Simpang empat Jalan Swadaya RT.04 (koordinat : 521509, 9911292), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembangunan Gorong Gorong jalan Swadaya RT.04,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
453	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	rt 02, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Peningkatan Gorong-gorong parit pole 2 simpang 3 RT 2 (-0,7814860, 117,2532385) ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
454	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	rt 2 jl. suka damai, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Penigkatan jalan simpang 3 pintu air Suka Damai RT. 02 (-0,7802754, 117,2820152),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
455	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	rt 01 , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembuatan Pondasi dudukan tandon mesjid Bitaqwa RT. 1 (-0,7682797, 117,2456696),OPD TUJUAN : Bagian Kesejahteraan Rakyat
456	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	rt 1 jl. vico, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Peningkatan Jalan Hasan G RT 01 (-0,7683923, 117,2457886),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
457	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	rt 03, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pengadaan pagar Teralis psyandu Kakap (- 0,7702901, 117,2433314),OPD TUJUAN : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
458	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	jl. nusantara rt 03, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Peningkatan Jalan Nusantara RT 3 (-0,7698332, 117,2440975),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
459	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	rt 03, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Semenisasi Jalan Nusantara RT 03 (-0,7718732, 117,2462624),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
460	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	rt 01 jl. vico, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Rehab Menara Mesjid Bitaqwa RT 1 (-0,7682797, 117,2456696),OPD TUJUAN : Bagian Kesejahteraan Rakyat
461	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pengadaan Pupuk Sawit/Ha)	kelurahan Tama pole, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pengadaan pupuk NPK untuk Petani RT 1 (- 0,7699197, 117,2439678),OPD TUJUAN : Dinas Perkebunan
462	Pemeliharaan Penerangan Bangunan di Kecamatan Muara Jawa	tama pole, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pengadaan Penerangan Jalan Suka Damai rt 02 (-0,7699197, 117,2439678),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
463	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	kelurahan tama pole, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pengurugkan Halaman Purban kelurahan Tama Pole RT 3 (-0,7705305, 117,2430981),OPD TUJUAN : Dinas Kesehatan

TABEL T.C-32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
464	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	rt03, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Rehab Gedung Serbaguna RT. 03 (-0,7708041, 117,2428962),OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
465	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	kel. tama pole, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembuatan teras dan Pemasangann Paving blok Paud mekar sari RT 03 (-0,7703304, 117,2432385),OPD TUJUAN : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
466	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Wilayah RT,04 (koordinat : 521531, 9911307), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Normalisasi Parit Besar RT.04,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
467	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Jalan Karya RT.03 (koordinat : 521531, 9910880), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Normalisasi Parit Jalan Karya RT.03,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
468	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Wilayah RT.01 (koordinat : 521202, 9911031), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembuatan Turap Pinggir Dermaga RT.01,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
469	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Jalan Swadaya RT.04 (koordinat : 521510, 9911300), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembuatan Turap Pinggir Jalan Swadaya RT.04,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
470	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Tepi Sungai Wilayah RT.02 dan RT.04 (Koordinat : 521275, 9911131. 521390, 9911384), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembuatan Jembatan Ulin Tepi Sungai untuk Lokasi Wisata Mancing dan Wisata Sungai,OPD TUJUAN : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

TABEL T.C-32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
471	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana Dermaga Sungai dan Danau	Wilayah RT.02 (koordinat : 521287, 9911104), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembuatan Pendopo Dermaga Tambatan Perahu RT.02,OPD TUJUAN : Dinas Perhubungan
472	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Wilayah RT.07 (koordinat : 521014, 9910792), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembuatan Jembatan Tambatan Perahu RT.07,OPD TUJUAN : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
473	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Jalan Pelita RT.01 dan RT.07 (Koordinat : 521239, 9911006. 521023, 9910665), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Lanjutan Pengaspalan Jalan Lingkungan dari RT.01 ke RT.07,OPD TUJUAN : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
474	Penyediaan perlengkapan Jalan (LPJU)	Jalan Abdul Rasyid RT.06 (521996.39, 9910413.36), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pemasangan Penerangan Lampu Jalan Poros,OPD TUJUAN : Dinas Perhubungan
475	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Jalan Abdul Rasyid RT.06 (koordinat : 522729, 9909639), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Lanjutan Pembangunan Kantor PKK Kelurahan Teluk Dalam.,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
476	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Jalan Abdul Rasyid RT.06 (koordinat : 522714, 9909593. 521404, 9910910), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Lanjutan Pembangunan Pagar Kantor Lurah Teluk Dalam,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
477	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Muara Jawa	Wilayah RT.03 (koordinat : 521440, 9910951), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Lanjutan Pembangunan Pagar Lingkungan Posyandu Bawal.1 dan TK Gelatik.5 Kel. Teluk Dalam,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
478	Penyediaan Mesin Kapal/Perahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT	Jalan Karya RT.03 (521826.65, 9910590.88), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Bantuan Mesin Ketinting untuk KUB Padadaan Semoga Jaya,OPD TUJUAN : Dinas Kelautan dan Perikanan

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
479	Penyediaan Kapal/Perahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT	Jalan Swadaya RT.04 (521512.62, 9911306.76), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Bantuan Perahu Ketinting untuk KUB Paja Lari Jaya (20 orang anggota),OPD TUJUAN : Dinas Kelautan dan Perikanan
480	Penyediaan Kapal/Perahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT	Jalan Swadaya RT.02 (Koordinat ; 521324, 9911086, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Bantuan Perahu Ketinting untuk KUB Nalayan Cipta Mandiri (20 anggota),OPD TUJUAN : Dinas Kelautan dan Perikanan
481	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pengadaan Pupuk Sawit/Ha)	Jalan Karya RT.03 (521399.83, 9910985.17), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pengadaan PUPUK NPK untuk Gapoktan Kel. Teluk Dalam (10 ton),OPD TUJUAN : Dinas Perkebunan
482	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Muara Jawa	Wilayah RT.03 (Koordinat : 521406.43, 9910926.26), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Rehab Bangunan Polindes Kel. Teluk Dalam,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
483	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Wilayah RT.06 (koordinat : 521985.58, 9910505.20), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Rehab Atap Langgar As Salam RT.06 (P.1),OPD TUJUAN : Bagian Kesejahteraan Rakyat
484	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Wilayah RT.01 (koordinat : 521234.24, 9911003.14), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Semenisasi Jalan ke Pelabuhan Lama RT.01,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
485	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT.10 GG. Salasiah Adam, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan masih berupa tanah ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
486	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT.11 Muara Pegah, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jembatan di atas air di muara pegah masih sangata terbatas,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

487	Peningkatan,Rekonstruksi jalan dan penanganan longsoran Kabupaten yang Menghubungkan Desa ke Ibukota Kecamatan	Jl.Husni Thamrim Rt.09 Kelurahan Muara Kembang , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Terdapatnya jalan yang dalam kodisi rusak disebagian JL.Husni Thamrin maka diperlukannya perbaikan (Jalan Husni Thamrin Kelurahan Muara Kembang Kecamatan Muara Jawa),OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
488	Penggantian Jembatan Kecamatan Panjang > 6 Meter Struktur Beton	RT.05 Jl.Mahakam Tengah Kelurahan Muara kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi jembatan kayu yang yang tidak layak maka perlu dibangun jembatan konstruksi beton. (Jembatan Handil Sulawesi Kelurahan Muara kembang),OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
489	Penggantian Jembatan Kecamatan Panjang > 6 Meter Struktur Beton	Jln Handil Surya RT.06 Kelurahan Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi jembatan kayu yang yang tidak layak maka perlu dibangun jembatan konstruksi beton. (Jembatan Handil Surya Kelurahan Muara kembang),OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
490	Peningkatan,Rekonstruksi jalan dan penanganan longsoran Kabupaten yang Menghubungkan Desa ke Ibukota Kecamatan	jL.Handil Petinggi RT.014 Kelurahan Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan berlubang maka perlu adanya perbaikan (jL.Handil Petinggi RT.014 Kelurahan Muara Kembang),OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
491	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT.01 Handil Gemuk, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jembatan RT.01 belum tersedia,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	PERKIRAAN BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
492	Peningkatan Rekonstruksi jalan dan penanganan longsoran Kabupaten yang Menghubungkan Desa ke Ibukota Kecamatan	jL.Handil Sulawesi RT.04 Kelurahan Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan berlubang dan masih tanah maka perlu adanya perbaikan (jL.Handil Sulawesi RT.04 Kelurahan Muara Kembang),OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
493	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT.02 Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jembatan GG.Keluarga RT.02 belum tersedia,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
494	Peningkatan,Rekonstruksi jalan dan penanganan longsoran Kabupaten yang Menghubungkan Desa ke Ibukota Kecamatan	., Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	.,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
495	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	GG. Durahman RT.02 Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Badan Jalan GG. Durahman RT.02 masih berupa tanah,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
496	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	RT.02 Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Badan Jalan Handil Buhari RT.02 sebagian mulai longsor,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
497	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Pengaspalan Jl.Lingkungan RT.02-RT.14 Kelurahan Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan berlubang dan perlu adanya perbaikan (Pengaspalan Jl.Lingkungan RT.02- RT.14 Kelurahan Muara Kembang),OPD TUJUAN : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
498	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Jl. Bahran Rt.03, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Badan Jalan Bahran RT.03 masih berupa tanah,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
499	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	RT.03 Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Badan jalan disekitar SD.009 mulai longsor,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
500	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan Muara Jawa	RT.04 Kelurahan Muara kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kurangnya Sumber Air Bersih Untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Kelurahan Muara Kembang Maka Perlu penambahan Sumur Air bersih (Pembuatan Sumur Bari dan Tangki Air Kelurahan Muara Kembang,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
501	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT.04 Handil Sulawesi, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Badan Jalan Handil Sulawesi masih berupa tanah,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
502	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Handil Sulwesi RT. 04, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Badan jalan handil sulawesi ada yang mulai longsor,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
503	Pemeliharaan Penerangan Bangunan di Kecamatan Muara Jawa	kelurahan muara kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	perlu adnya perawatan penggantian suku cadang penerangan ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
504	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Handil Surya Rt.06, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Badan Jalan Handil Surya RT.06 Masih berupa tanah,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

505	Penyediaan perlengkapan Jalan (LPJU)	RT. 14, RT. 05, dan RT.09, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pemasangan Penerangan Jalan Umum di Jl. Mahakam Ili, Jl. Mahakam Ulu dan Jl. Husni Thamrin , kondisi badan jalan gelap,OPD TUJUAN : Dinas Perhubungan
506	Peningkatan,Rekonstruksi jalan dan penanganan longsoran Kabupaten yang Menghubungkan Desa ke Ibukota Kecamatan	RT.014 Jln.Handil Petinggi Menuju Jl.Karya Bersama Kelurahan Muara kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	kondisi jalan yang masih keadaan tanah maka perlunya ditingkatkan (Pembuatan Badan Jalan Dari Jln.Handil Petinggi Menuju Jl.Karya Bersama Kelurahan Muara kembang,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
507	Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK dan Tangki Septik	Kelurahan Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Tidak tersedianya MCK di Bantaran sungai ,sehingga masyarakan menggunakan Jamban Tradisional. (Pembuatan MCK untuk 100 KK, Kelurahan Muara kembang),OPD TUJUAN : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
508	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	RT.07 Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Sebagian Badan Jl Handi; setia mulai longsor sehingga perlu diturap,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
509	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan Muara Jawa	Wilayah RT.06 (522054.98, 9910404.58), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Air bersih belum tercukupi untuk pendistribusiannya, (Pembangunan Bak Penampungan Air Bersih),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
510	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan Muara Jawa	Wilayah RT.06 (522054.98, 9910404.58), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum Terpenuhiny Kebutuahn Air Bersih Perlu Tambahan Sumber Air Baru (Pembuatan Sumur Bor Baru dan Mesin Penyedot),OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
511	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Sejahtera Rt.02 524605.40 - 9906108.38, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Parit Meluap (Peningkatan Parit Gang Sejahtera Rt.02) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

512	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gg.Tunas Muda RT.07 524023.43 - 9905177.19, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Parit Meluap (Pembuatan Parit Beton Gg.Tunas Muda RT.07) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
513	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Rambai RT.08 523889.20 - 9904778.92, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Parit Meluap (Peningkatan Drainase Gang Rambai RT.08) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
514	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	TT.09 521680.47 - 9906193.55, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Parit Meluap (Peningkatan Drainase RT.09) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
515	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Sindang Jaya RT.09 521507.04 - 9906235.33 , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Parit Meluap (Peningkatan Parit Jalan Sindang Jaya RT.09) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
516	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Hair RT 10524704.41 - 9904446.58, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Parit Meluap (Pembuatan Parit Beton Gang Hair RT 10) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
517	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Al-Hikmah RT 10 523761.43 - 9904522.95, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Parit Meluap (Pembuatan Parit Beton Gang Al-Hikmah RT 10) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
518	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT.12 521779.19 - 9906107.09, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Parit Meluap (Peningkatan Parit Kuburan RT.12) P2 ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
519	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Wilayah RT.03 (521402.22, 9910921.07), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Halaman Posyandu Masih Tanah (Pemasangan Paving Halaman Posyandu Bawal.1),OPD TUJUAN : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
520	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Handil 7 524053.08 - 9904508.11, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Parit Meluap (Normalisasi Sungai Handil 7) P2 ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
521	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang PLN RT.16524984.64 - 9906686.65, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Parit Meluap (Peningkatan Parit Beton Gang PLN RT.16) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
522	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT. 11 525294.03 - 9905252.22 , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Parit Meluap (Peningkatan Drainase Parit RT.11) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
523	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT 15 521562.68 - 9905768.06 , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Parit Meluap (Pembuatan Parit Beton Lingkungan RT 15) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
524	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Handil 6 523864.08 - 9905226.52 , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Badan Jalan terkikis oleh parit (Pembuatan Turap Kuburan Muslimin) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
525	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	RT. 08 523881.48 - 9904899.74 , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Badan Jalan terkikis oleh parit (Turap Parit Gang Ruhui Rahayu RT.08) P2 ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
526	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Handil Jawa 524208.48 - 9940935.47 , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jembatan Rusak (Renovasi Jembatan Handil Jawa) P2 524208.48 - 9940935.47 ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
527	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT.11 526156.19 - 9905091.31, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jembatan yang Rusak (Perbaikan Jembatan Depan SDN 001 RT.11) P2 ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
528	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	RT.12 521744.41 - 9906033.87, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya gedung serbaguna (Pembangunan Gedung Serbaguna RT.12) P2 ,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
529	Fasilitasi sarana prasarana desa	RT. 03 524263.20 - 9905965.02, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum Adanya Gapura (Pembangunan Gapura Jl.Darul Amin RT.03) P2 ,OPD TUJUAN : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
530	Fasilitasi sarana prasarana desa	Gang Pasar RT.05524138.43 - 9905644.03 , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya Gapura (Pembangunan Gapura Gang Pasar RT.05) P2,OPD TUJUAN : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
531	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jln.Darussalam RT.14 524090.06 - 9905424.12, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum adanya Gapura (Pembangunan Gapura Jln.Darussalam RT.14) P2,OPD TUJUAN : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
532	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	KELURAHAN TAMA POLE , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Rehab Gedung Pusban Kel. Tama Pole (- 0,7705305, 117,2430981),OPD TUJUAN : Dinas Kesehatan
533	Fasilitasi sarana prasarana desa	RT. 14 524090.06 - 9905424.12, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Belum Adanya Gapura (Pembangunan Gapura Jln.Darussalam RT.14) P2 ,OPD TUJUAN : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
534	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Kel.Muara Jawa Tengah, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	(Pengadaan Genset dan Sound Sistem Masjid Hidayatullah Kel.Muara Jawa Tengah) P2,OPD TUJUAN : Dinas Kepemudaan dan Olahraga
535	Penyediaan Alat Penunjang / Peraga (BKB Kit, BKB HI, BKL Kit, BKB Kit Stunting, BKR Kit, Kit Siap Nikah Anti Stunting)	Kel.Muara Jawa Tengah, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	(Pengadaan APE Dalam KB SAQURA Kel.Muara Jawa Tengah P)2,OPD TUJUAN : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
536	Pengadaan Bahan Pembuatan Alat Tangkap Ikan (Jaring)	Kel.Muara Jawa Tengah, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	(Pengadaan Alat Penunjang Usaha UMKM "BERKAH UMMA") P2,OPD TUJUAN : Dinas Kelautan dan Perikanan
537	Pengadaan Mesin Pompa	Kel.Muar Jawa Tengah, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	(Pengadaan Alkon RKT) P2,OPD TUJUAN : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
538	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Jl.Darul Amin RT.03 525805.00 - 9905791.51 , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Lanjutan Semenisasi Jl.Darul Amin RT.03) P4 ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
539	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	GG. TK/PGRI RT.08, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Badan Jalan GG. TK/PGRI RT.08 Masih Berupa tanah,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
540	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Jawa	Jl. Darul Amin RT.3524309.02 - 9905933.03 , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Jalan Rusak (Pemeliharaan/Pengaspalan Jl. Darul Amin RT.3) P4,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
541	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT.10, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Badan Jalan Palima RT.10 Masih berupa tanah 300 meter ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

542	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Jl.Darul Amin RT.03 "526184.28 - 9905795.29, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Parit Meluap (Pembuatan Gorong- gorong Jl.Darul Amin RT.03) P4 ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
543	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Muara Besar RT.13, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembuatan Jembatan Muara Ulu Besar RT.13 75 Meter,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
544	Pembangunan Saluran Gorong- gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Jl.Darussalam RT.152627594.94 - 9905063.67, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Parit Meluap (Pembuatan Gorong- gorong Jl.Darussalam RT.11) P4 ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
545	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Muara Pegah RT.11, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembuatan Jembatan Muara Pergah RT.11 80 Meter,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
546	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Jl.Darul Ilmi RT.13 524563.51 - 9904399.49 , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Kondisi Parit Meluap Pembuatan Gorong-gorong Jl.Darul Ilmi RT.13) P4,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
547	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT.14, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Peningkatan Badan Jalan Handil Petinggi RT.14, 200 Meter,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
548	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Jalan Darul Amin RT.03524441.04 - 9905848.00, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Badan Jalan terkikis oleh parit (Lanjutan Turap Beton Sungai Besar Jalan Darul Amin RT.03) P4 ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

549	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Kelurahan Muara Jawa Tengah 525239.31 - 9905234.71, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	(Pembangunan Gedung Madrasyah Kel.Muara Jawa Tengah) P4525239.31 - 9905234.71 ,OPD TUJUAN : Dinas Pekerjaan Umum
550	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT.15, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Peningkatan Badan Jalan GG. Handil Setia RT.15, 100 meter,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
551	Pengadaan ambulans desa darat dan air	Kelurahan Muara Jawa Tengah, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	(Pengadaan Mobil Ambulance) P4,OPD TUJUAN : Dinas Kesehatan
552	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT.15, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pengaspalan Badan Jalan GG.TK/TPA Nursa'adah. P.100 Meter & L. 3 Meter,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
553	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	RT.05, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Peningkatan Badan Jalan GG.LPM P.100 meter L. 2 Meter,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
554	Penyediaan Mesin Kapal/Perahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT	Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Bantuan Mesin dan Perahu Kelompok Nelayan Pusaka Maju Bersama,OPD TUJUAN : Dinas Kelautan dan Perikanan
555	Penyediaan Mesin Kapal/Perahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT	Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Bantuan Mesin Honda 13 PK KUB Nelayan Rakang Kepiting Sejahtera,OPD TUJUAN : Dinas Kelautan dan Perikanan
556	Penyediaan Kapal/Perahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT	Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pengadaan Perahu Nelayan KUB Restu Ibu,OPD TUJUAN : Dinas Kelautan dan Perikanan

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	PERKIRAAN BIAYA	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
557	Penyediaan Mesin Kapal/Perahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT	RT.11 Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pengadaan Mesin Ketinting KUB Pemuda Bersatu Muara Pegah,OPD TUJUAN : Dinas Kelautan dan Perikanan
558	Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) di Kecamatan Muara Jawa	Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembangunan Mushola SMP N.3 8 M x 8 M ,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
559	Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) di Kecamatan Muara Jawa	RT.03 Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'55"S 117°14'54"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Bangunan sudah tidak layak jadi perlu adanya (Rehab Mushollah Nurul Iman RT.03) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
560	Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) di Kecamatan Muara Jawa	RT.04 Muara Jawa Pesisir (0°49'51"S 117°14'57"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Bangunan sudah tidak layak jadi perlu adanya (Rehab Mushola Babussalim di gg jumran RT.04) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
561	Pembangunan Ruang Kelas/Guru PAUD	RT.15 Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pembangunan Gedung Kantor & Ruangan kelas Kb. Melati Muara Kembang ,OPD TUJUAN : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
562	Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam PAUD	RT.15 Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pengadaan Alat Permainan Luar Kb. Melati ,OPD TUJUAN : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
563	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	RT.15 Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pengadaan Paving Blok & Kenopi Kb Melati ,OPD TUJUAN : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
564	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	RT.15 Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pemuatan pagar Kb. Melati ,OPD TUJUAN : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
565	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	RT.15 Muara Kembang, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Pengadaan WC Siswa/siswi Kb Melati ,OPD TUJUAN : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TABEL T.C-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
566	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Blok B RT.20 (Lanjutan) Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'55"S 117°14'05"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Jalan Rusak Peningkatan Jalan Gang Rawa Indah Blok B RT.20 (Lanjutan) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
567	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Gang Rawa Indah Blok B RT.20 (Lanjutan) Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'55"S 117°14'05"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	KOndisi Jalan Rusak (Peningkatan Jalan Gang Rawa Indah Blok B RT.20)(Lanjutan) P2,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
568	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Jawa	Sepanjang Jalan A.Yani Kelurahan Muara Jawa Pesisir (0°49'36"S 117°14'39"E), Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	Saluran Buntu (Normalisasi Saluran Air Sepanjang Jalan A. Yani Dari Simpang 3 sampai Terminal) P4,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
569	Pemeliharaan Penerangan Bangunan di Kecamatan Muara Jawa	Kelurahan Muara Jawa Pesisir , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	ada beberapa daerah yg tidak terjangkau penerangan jadi rawan terjadi hal2 yang tidak dinginkan ,jadi kamk sangat membutuhkan adanya (Pengadaan instalasi lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga surya) P4,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa
570	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Jawa	Jalan Teluk Ladang Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Paket	masih ada yang belum di semen maka Perlu adanya (Cor Beton Parit Jalan Teluk Ladang Kelurahan Muara Jawa Pesisir) P4,OPD TUJUAN : Kecamatan Muara Jawa

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Upaya pembangunan yang dilakukan di daerah adalah merupakan bagian integral dari upaya pembangunan nasional.Sehingga ketika daerah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus selaras dengan RPJP Daerah (Perda Kab Kukar No. 17 Tahun 2010), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi (Perda Propinsi No. 15 Tahun 2008) dan Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional (Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010).

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegaramemperhatikan 6 (enam) Prioritas, Fokus dan Sasaran Daerah tahun 2025 adalah :

PRIORITAS KABUPATENKUTAI KERTANEGARA		FOKUS PEMBANGUNAN		SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET RKPD 2025	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
1	Penataan dan Pengembanga n TataKelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah	Meningk atnya akuntabil itas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Persepsi Anti Korupsi	8.50	4	11	51
		2	Peningkata n jangkauan dan mutu layanan pemerintah andan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu berbasis IT	Meningkat nya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	9.85	9	15	48
2	Pengembangan sumberdaya manusiayang sehat, produktif,teramp il	3	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan	Meningkat nya Kualitas Layanan Pendidikan	Indeks Pembanguna n Kebudayaan	51.50	9	12	36

			sosial dalam kehidupan kemasyaraka tan	, Ketahanan Sosial danPelestarian Kebudayaan	Indeks Pendidikan	0.704			
		4	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan dan Pendidikan yang bermutu	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyaraka t	Indeks Kesehatan	0.821	5	15	103
3	Percepatan pembanguna n desadan kawasan perdesaan	5	Penguatan kecamatan pusat pertumbuh an dan pengemban gan kawasan strategis daerah	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyara kat	Indeks Desa Membangun	0.80	4	4	11
4	Peningkatan	6	Pengembang an	Menurunny	Tingkat	3.4	2	4	13

	kapasitas dan kompetensi angkatan kerja		kewirausaha an dan manajemen bisnis bagikaum muda	a penganggu ran di masyarakat	Penganggura n Terbuka	5			
					PDRB PerKapita	381.63			
5	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	7	Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam, sosialbudaya, dan olah raga yang berkelanjuta n	Meningk atnya Daya Saing Pariwisat a Daerah	Laju Pertumbuha n Ekonomi Sektor Pariwisata	4.00	3	6	17
		8	Peningkatan produktivitas industri kreatif	Berkembang nya EkosistemEk onomi Kreatif	Laju Pertumbuh an Ekonomi Kreatif	7.48	2	4	10

6	Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN	9	Pembangun an prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah	Meningkatn ya aksesibilitas dan konektivit as wilayah	Indeks Aksesibilitas Wilayah	87.18	2	3	20

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional.

RPJMD Tahun 2025 adalah tahapan kedua dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun , yaitu "*Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Bahagia*". Penyusunan RPJMD ini mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan evaluasi Pembangunan selama lima tahun sebelumnya, pembangunan yang dilaksanakan telah memberikan dampak baik positif maupun negative bagi kehidupan masyarakat.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yangakan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan Birokrasi yang bersih, Efektif, dan Melayanai
2. Meningkatkan Sumber daya Manusia yang berakhlak Mulia, unggul dan berbudaya
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah.
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan

Keterkaitan antara Visi Misi Bupati dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

VISI	MENUJU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN	
	Misi ke 1 Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif Efisien dan Melayani	TUGAS ❖ Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Kecamatan ❖ Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum. ❖ Mengkoordinasikan nyelenggaraan kegiatan pemerintahn yang dilakukan oleh perangkat di Tingkat Kecamatan ❖ Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan ❖ Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten FUNGSI ❖ Menyusun kebijakan teknis operasional Kecamatan ❖ Melaksanakan pelayanan Publik ❖ Menyusun laporan secara periodic kepada Bupat
	MISI BUPATI KUTAI KARTANEGARA	TUPOKSI KECAMATAN
	Misi ke 2 Memperkuat pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	TUGAS ❖ Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat FUNGSI ❖ Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dankemasyarakatan
	Misi ke 4 Meningkatkan Kualit as L ayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah	TUGAS ❖ Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desaatau sebutan lain dan /atau kelurahan FUNGSI ❖ Menyelenggarakan pembinaan Wilayah ❖ MEmbina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan

3.2 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan yang Efektif Efisien Inovatif Transparan dan Akuntabel	Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Pertumbuhan pendapatan asli daerah kewenangan Kecamatan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Jawa yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Muara Jawa Tahun 2021-2026.Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelummnya Kecamatan Muara Jawa mempunyai tujuan yaitu "*Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel*", yang artinya Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah. Meningkatkan sarana infrastruktur sebagai akses masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan partisipasi masyarakat / perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbangcam, meningkatkan kelancaran proses administrasi kependudukan dan meningkatkan keamanan lingkungan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu "*Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan*", yang artinya meningkatnya tertib administrasi pemerintah dan kualitas pelayanan publik dan meningkatnya Interkoneksitas antar wilayah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Kecamatan mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Kecamatan juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas- tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan,penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang -undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, sertapelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan Kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Kecamatan sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio ku ltural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalamkerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memnberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalamupaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten.

a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Muara Jawa diarahkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Muara Jawa merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara nantinya.

- Pencapaian SDGs

Sustainable Development Golds merupakan sebuah program pembangunan berkelaj utan dimana kesepakan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menanda tangani SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menanda tangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target SGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Muara Jawa diimplentasikan untuk mencapai target-target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengetasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh

perhatian serius.

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kab. Kutai Kartanegara. Demikian pula halnya dengan Penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Muara Jawa. Program dan kegitan yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Muara Jawa diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Pelayanan Administrasi Kantor dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Muara Jawa sebagai sebuah Kecamatan di Kab. Kutai Kartanegara memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kab. Kutai Kartanegara. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil berupa UKM (Usaha Kecil Menengah), dibidang peternakan, perikanan, pertanian obyek-obyek pariwisata kota juang dan migas. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Muara Jawa melalui penyusunan

berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b) Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan

a. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025 adalah 5 Program dengan 14 Kegiatan.

b. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Muara Jawa sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Muara Jawa dan melingkupi 8 Kelurahan.

c. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.

Kebijakan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan urusan kewenangan yang dilimpahkan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 dalam table T.C-33 sebagai berikut:

TABEL T.C-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8		9
	KECAMATAN MUARA JAWA & 8 KELURAHAN		Kecamatan Muara Jawa		59.061.311.962,00				60.036.410.460,00
	KECAMATAN MUARA JAWA		Kecamatan Muara Jawa		44.599.971.962,00				45.575.070.460,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	65 Nilai	25.005.620.460,00		65	Nilai	25.005.620.460,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	36 Dokumen	605.000.000,00		36	Dokumen	605.000.000,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	3 Dokumen	140.000.000,00		3	Dokumen	140.000.000,00
	Penyusunan Dokumen RENSTRA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	1 Dokumen	100.000.000,00		1	Dokumen	100.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Renja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	1 Dokumen	30.000.000,00		1	Dokumen	30.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Renja - P	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	1 Dokumen	10.000.000,00		1	Dokumen	10.000.000,00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Muara Jawa	1 Dokumen	5.000.000,00		1	Dokumen	5.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Muara Jawa	1 Dokumen	5.000.000,00		1	Dokumen	5.000.000,00
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kecamatan Muara Jawa	1 Dokumen	5.000.000,00		1	Dokumen	5.000.000,00
	PKoordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Muara Jawa	1 Dokumen	5.000.000,00		1	Dokumen	5.000.000,00

TABEL T.C-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Muara Jawa	3	Dokumen	70.000.000,00		3	Dokumen	70.000.000,00
	Pelaporan Manajemen resiko,Evaluasi Kinerja Triwulan (E-Pantau) dan penyusunan LKJIP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Muara Jawa	3	Dokumen	70.000.000,00		3	Dokumen	70.000.000,00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	2	Laporan	60.000.000,00		2	Laporan	60.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	2	Laporan	60.000.000,00		2	Laporan	60.000.000,00
7.01.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	200	Data	300.000.000,00		200	Data	300.000.000,00
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	200	Data	300.000.000,00		200	Data	300.000.000,00
7.01.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	25	Berita Acara	25.000.000,00		25	Berita Acara	25.000.000,00
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	25	Berita Acara	25.000.000,00		25	Berita Acara	25.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Kecamatan Muara Jawa	14	Laporan	17.588.892.456,00		14	Laporan	17.588.892.456,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Muara Jawa	924	Orang/bulan	17.059.852.456,00		924	Orang/bulan	17.059.852.456,00

TABEL 1.C-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	924 Orang/bulan		17.059.852.456,00		924 Orang/bulan	17.059.852.456,00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Muara Jawa	1 Laporan		25.000.000,00		1 Laporan	25.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	1 Laporan		25.000.000,00		1 Laporan	25.000.000,00
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kecamatan Muara Jawa	2 kali		-		2 kali	-
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Kec. Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	2 Dokumen		-		2 Dokumen	-
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Muara Jawa	14 Laporan		479.040.000,00		14 Laporan	479.040.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kec. Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	14 Laporan		479.040.000,00		14 Laporan	479.040.000,00
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Muara Jawa	1 Dokumen		25.000.000,00		1 Dokumen	25.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Muara Jawa	1 Dokumen		25.000.000,00		1 Dokumen	25.000.000,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya pengadministrasian Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Kecamatan Muara Jawa	1017 Unit		280.200.000,00		1017 Unit	280.200.000,00
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Muara Jawa	1 Dokumen		25.000.000,00		1 Dokumen	25.000.000,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Muara Jawa	1 Dokumen		25.000.000,00		1 Dokumen	25.000.000,00

TABEL 1.C-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Muara Jawa	2	Dokumen	150.000.000,00		2 Dokumen	150.000.000,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Muara Jawa	2	Dokumen	150.000.000,00		2 Dokumen	150.000.000,00
7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Muara Jawa	1	Laporan	50.000.000,00		1 Laporan	50.000.000,00
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Muara Jawa	1	Laporan	50.000.000,00		1 Laporan	50.000.000,00
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Muara Jawa	12	Laporan	55.200.000,00		12 Laporan	55.200.000,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Muara Jawa	12	Laporan	55.200.000,00		12 Laporan	55.200.000,00
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	0	Laporan	-		0 Laporan	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	0	Laporan	-		0 Laporan	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian kepada pegawai	Kecamatan Muara Jawa	170	Orang	705.511.992,00		170 Orang	705.511.992,00
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Muara Jawa	0	Unit	-		0 Unit	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Muara Jawa	0	Unit	-		0 Unit	-
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Muara Jawa	156	Paket	162.000.000,00		156 Paket	162.000.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Bagi Pegawai Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Muara Jawa	156	Paket	162.000.000,00		156 Paket	162.000.000,00
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Muara Jawa	20	Orang	200.000.000,00		20 Orang	200.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kecamatan Muara Jawa Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kec. Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa	20	Orang	200.000.000,00		20 Orang	200.000.000,00
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Muara Jawa	120	Orang	143.511.992,00		120 Orang	143.511.992,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Muara Jawa	120	Orang	143.511.992,00		120 Orang	143.511.992,00

			Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026

TABEL 1.C-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan (Outcome/Output)	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Lokasi							
7.01.01.2.06	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Muara Jawa	20	Orang	200.000.000,00		20	Orang	200.000.000,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Muara Jawa	20	Orang	200.000.000,00		20	Orang	200.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Jawa	11	Layanan	1.085.000.000,00		11	Layanan	1.085.000.000,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Muara Jawa	1	Paket	50.000.000,00		1	Paket	50.000.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Muara Jawa	1	Paket	50.000.000,00		1	Paket	50.000.000,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Muara Jawa	1	Paket	150.000.000,00		1	Paket	150.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Muara Jawa	1	Paket	150.000.000,00		1	Paket	150.000.000,00
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Muara Jawa	1	Paket	25.000.000,00		1	Paket	25.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Muara Jawa	1	Paket	25.000.000,00		1	Paket	25.000.000,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Muara Jawa	1	Paket	300.000.000,00		1	Paket	300.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Muara Jawa	1	Paket	300.000.000,00		1	Paket	300.000.000,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Muara Jawa	1	Paket	50.000.000,00		1	Paket	50.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Muara Jawa	1	Paket	50.000.000,00		1	Paket	50.000.000,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Muara Jawa	0	Dokumen	-		0	Dokumen	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Muara Jawa	1	Dokumen	-		1	Dokumen	-
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Muara Jawa	1	Paket	25.000.000,00		1	Paket	25.000.000,00
	Penyediaan Bahan/Material Kantor Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Muara Jawa	1	Paket	25.000.000,00		1	Paket	25.000.000,00
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Muara Jawa	1	Laporan	30.000.000,00		1	Laporan	30.000.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Muara Jawa	1	Laporan	30.000.000,00		1	Laporan	30.000.000,00

			Rencana Tahun 2025				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026			

TABEL T.C-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan (Outcome/Output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Rencana Tahun 2025				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Muara Jawa	426	Laporan	350.000.000,00		426	Laporan	350.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Muara Jawa	426	Laporan	350.000.000,00		426	Laporan	350.000.000,00
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Muara Jawa	5000	Dokumen	70.000.000,00		5000	Dokumen	70.000.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Muara Jawa	5000	Dokumen	70.000.000,00		5000	Dokumen	70.000.000,00
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Muara Jawa	1	Dokumen	35.000.000,00		1	Dokumen	35.000.000,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Muara Jawa	1	Dokumen	35.000.000,00		1	Dokumen	35.000.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kecamatan Muara Jawa	30	Unit	568.380.000,00		30	Unit	568.380.000,00
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	Kecamatan Muara Jawa	0	Unit	-		0	Unit	-
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kecamatan Muara Jawa	1	Unit	180.000.000,00		1	Unit	180.000.000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kecamatan Muara Jawa	Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kecamatan Muara Jawa	1	Unit	180.000.000,00		1	Unit	180.000.000,00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Muara Jawa	15	Unit	90.000.000,00		15	Unit	90.000.000,00
	Pengadaan Mebel Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Muara Jawa	15	Unit	90.000.000,00		15	Unit	90.000.000,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Muara Jawa	13	Unit	98.380.000,00		13	Unit	98.380.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Muara Jawa	13	Unit	98.380.000,00		13	Unit	98.380.000,00
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Muara Jawa	1	Unit	200.000.000,00		1	Unit	200.000.000,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Muara Jawa	1	Unit	200.000.000,00		1	Unit	200.000.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kecamatan Muara Jawa	12	Bulan	3.117.636.012,00		12	Bulan	3.117.636.012,00

TABEL 1.C-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan (Outcome/Output/Impact)	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Muara Jawa	12	Laporan	50.000.000,00		12	Laporan	50.000.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Muara Jawa	12	Laporan	50.000.000,00		12	Laporan	50.000.000,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Muara Jawa	12	Laporan	1.100.000.000,00		12	Laporan	1.100.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Muara Jawa	12	Laporan	1.100.000.000,00	Pagu anggaran kurang, sesuai hasil rekon anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.1.458.918.129,-	12	Laporan	1.458.918.129,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Muara Jawa	12	Laporan	1.967.636.012,00		12	Laporan	1.967.636.012,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Muara Jawa	12	Laporan	1.967.636.012,00	Pagu anggaran kurang. Sesuai hasil rekon, anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.2.453.625.456,-	12	Laporan	2.453.625.456,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kecamatan Muara Jawa	114	Unit	1.055.000.000,00		114	Unit	1.055.000.000,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Muara Jawa	1	Unit	50.000.000,00		1	Unit	50.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Muara Jawa	1	Unit	50.000.000,00		1	Unit	50.000.000,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Muara Jawa	9	Unit	390.000.000,00		9	Unit	390.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Muara Jawa	9	Unit	390.000.000,00		9	Unit	390.000.000,00
7.01.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Kecamatan Muara Jawa	1	Unit	50.000.000,00		1	Unit	50.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Kecamatan Muara Jawa	1	Unit	50.000.000,00		1	Unit	50.000.000,00
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kecamatan Muara Jawa	0	Unit	-		0	Unit	-
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Muara Jawa	50	Unit	65.000.000,00		50	Unit	65.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Muara Jawa	50	Unit	65.000.000,00		50	Unit	65.000.000,00
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Muara Jawa	50	Unit	300.000.000,00		50	Unit	300.000.000,00

			Rencana Tahun 2025				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026			

TABEL T.C-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan (Outcome/Output Kegiatan)	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Lokasi							
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Muara Jawa	50	Unit	300.000.000,00		50	Unit	300.000.000,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Muara Jawa	2	Unit	200.000.000,00		2	Unit	200.000.000,00
	Pemeliharaan Gedung Kantor Camat Muara Jawa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Muara Jawa	1	Unit	100.000.000,00		1	Unit	100.000.000,00
	Pemeliharaan Rumah Jabatan Camat Muara Jawa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Muara Jawa	1	Unit	100.000.000,00		1	Unit	100.000.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Kecamatan Muara Jawa	85	Persen	1.919.650.000,00		85	Persen	1.919.650.000,00
		Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan		100	Persen	10.600.000.000,00		100	Persen	10.600.000.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Muara Jawa	2	Kegiatan	450.000.000,00		2	Kegiatan	450.000.000,00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Muara Jawa	2	Laporan	150.000.000,00		2	Laporan	150.000.000,00
	Fasilitasi Kegiatan Erau Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Muara Jawa	1	Laporan	100.000.000,00		1	Laporan	100.000.000,00
	Fasilitasi Stunting (Rembuk dan Operasional TPPS) Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Muara Jawa	1	Laporan	50.000.000,00		1	Laporan	50.000.000,00
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Muara Jawa	1	Dokumen	300.000.000,00		1	Dokumen	300.000.000,00
	Fasilitasi HUT RI Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Muara Jawa	1	Dokumen	300.000.000,00		1	Dokumen	300.000.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kecamatan Muara Jawa	2	Kegiatan	12.069.650.000,00		2	Kegiatan	12.069.650.000,00

			Rencana Tahun 2025				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026			

TABEL 1.C-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kecamatan Muara Jawa	543	Laporan	1.469.650.000,00		543	Laporan	1.469.650.000,00
	Pengelolaan persampahan Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan	Kecamatan Muara Jawa	1	Laporan	800.000.000,00		1	Laporan	800.000.000,00
	Pemeliharaan sarana dan prasarana Lampu Penerangan Jalan Umum 8 Kelurahan di Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Unit	Kecamatan Muara Jawa	529	Unit	449.650.000,00		529	Unit	449.650.000,00
	Fasilitasi PATEN Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan	Kecamatan Muara Jawa	12	Laporan	70.000.000,00		12	Laporan	70.000.000,00
	Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan	Kecamatan Muara Jawa	1	Laporan	150.000.000,00		1	Laporan	150.000.000,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Muara Jawa	24	Laporan	10.600.000.000,00		24	Laporan	10.600.000.000,00
	Lanjutan Pembuatan Parit Padat Karya RT. 18 Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Jawa Ulu	1	Laporan	200.000.000,00	Musrenbang ID Usulan 1405225 Catatan Kepala Perangkat Daerah : Prioritas Nomor 3	1	Laporan	200.000.000,00
	Pembangunan Jalan Jalan Kuburan Muslimin RT.07 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Jawa Tengah	1	Laporan	200.000.000,00	Musrenbang ID Usulan 1423983 Catatan Kepala Perangkat Daerah : Prioritas Nomor 2	1	Laporan	200.000.000,00
	Semenisasi Gang Saudara RT 13 Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Dondang	1	Laporan	200.000.000,00	Musrenbang ID Usulan 1383000 Catatan Kepala Perangkat Daerah : Prioritas Nomor 6	1	Laporan	200.000.000,00
	Peningkatan badan jalan Hibrida Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Jawa Ilir	1	Laporan	200.000.000,00	Musrenbang ID Usulan 1410413 Catatan Kepala Perangkat Daerah : Prioritas Nomor 1	1	Laporan	200.000.000,00
	Pengaspalan Jalan Karya RT.03 Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Teluk Dalam	1	Laporan	200.000.000,00	Musrenbang ID Usulan 1425706 Catatan Kepala Perangkat Daerah : Prioritas Nomor 5	1	Laporan	200.000.000,00
	Peningkatan Badan Jalan Gang Alqodiri RT.08 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Jawa Pesisir	1	Laporan	200.000.000,00	Musrenbang ID Usulan 1404017 Catatan Kepala Perangkat Daerah : Prioritas Nomor 4	1	Laporan	200.000.000,00
	Lanjutan Peningkatan Jalan Jalan Lapana RT. 7 Kel. Dondang Kecamatan Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara (Pkr_zais)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Jawa Pesisir	1	Laporan	700.000.000,00	AKHMAD ZAIS. H,R,H	1	Laporan	700.000.000,00
	Lanjutan Peningktan Jalan Tembus Gang Kelapa Kel. Dondang Kecamatan Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara (Pkr_zais)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Jawa Pesisir	1	Laporan	700.000.000,00	AKHMAD ZAIS. H,R,H	1	Laporan	700.000.000,00
	Lanjutan Jembatan Nelayan RT. 8 Kel. Dondang Kecamatan Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara (Pkr_zais)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Jawa Pesisir	1	Laporan	600.000.000,00	AKHMAD ZAIS. H,R,H	1	Laporan	600.000.000,00
	Lanjutan Jembatan Nelayan RT. 04 Kel. Dondang Kecamatan Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara (Pkr_zais)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Jawa Pesisir	1	Laporan	600.000.000,00	AKHMAD ZAIS. H,R,H	1	Laporan	600.000.000,00

TABEL 1.C-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

	Normalisasi Drainase RT. 10 dan RT. 9 Kel. Dondang Kecamatan Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara (Pkr_zais)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Jawa Pesisir	1	Laporan	200.000.000,00	AKHMAD ZAIS. H,R,H	1	Laporan	200.000.000,00
	Normalisasi Drainase RT. 014 Kel. Dondang Kecamatan Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara (Pkr_zais)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Jawa Pesisir	1	Laporan	200.000.000,00	AKHMAD ZAIS. H,R,H	1	Laporan	200.000.000,00
	Peningkatan Jalan Musantara Kel. Tama Pole Kecamatan Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara (Pkr_zais)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Jawa Pesisir	1	Laporan	1.000.000.000,00	AKHMAD ZAIS. H,R,H	1	Laporan	1.000.000.000,00
	pembuatan jalan baru handil petinggi Rt 14 Kel. muara kembang Kec. muara jawa (Pkr_muh)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Jawa Pesisir	1	Laporan	1.200.000.000,00	MUH SHALEH	1	Laporan	1.200.000.000,00
	peningkatan jalan sidang Gg sawo Kel. Muara jawa ilir Kec. muara jawa (Pkr_muh)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Jawa Pesisir	1	Laporan	400.000.000,00	MUH SHALEH	1	Laporan	400.000.000,00
	normalisasi parit handil 8 Rt.3 Kel. Muara jawa ilir Kec. muara jawa (Pkr_muh)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Jawa Pesisir	1	Laporan	200.000.000,00	MUH SHALEH	1	Laporan	200.000.000,00
	Normalisasi parit besar handil 8 Rt. 11 Kel. Muara jawa ilir Kec. muara jawa (Pkr_muh)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Jawa Pesisir	1	Laporan	200.000.000,00	MUH SHALEH	1	Laporan	200.000.000,00
	Peningkatan jalan gg onthel Rt 28 kel.Muara Jawa Pesisir kec.Muara Jawa jalan gg onthel Rt 28 kel.Muara Jawa Pesisir kec.Muara Jawa (Pkr_sab)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Jawa Pesisir	1	Laporan	500.000.000,00	SA''BIR	1	Laporan	500.000.000,00
	peningkatan jalan gg. jasa bhakti Rt 04 kel.Muara Jawa Pesisir kec.Muara Jawa (Pkr_sab)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Jawa Pesisir	1	Laporan	1.000.000.000,00	SA''BIR	1	Laporan	1.000.000.000,00
	Pembuatan drainase Gg. LANGGAR Rt 05 kel.Muara Jawa Pesisir MUARA JAWA (Pkr_sab)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Jawa Pesisir	1	Laporan	300.000.000,00	SA''BIR	1	Laporan	300.000.000,00
	Pembuatan jembatan deck beton Gg. josch Rt 09 kel.Muara Jawa Pesisir MUARA JAWA (Pkr_sab)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Jawa Pesisir	1	Laporan	200.000.000,00	SA''BIR	1	Laporan	200.000.000,00
	Pembuatan jembatan ulin blok tepian 3 jln Tahir Rt 08 kel.Muara Jawa Pesisir MUARA JAWA (Pkr_sab)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Jawa Pesisir	1	Laporan	400.000.000,00	SA''BIR	1	Laporan	400.000.000,00
	Semenisasi Gg. SAHABAT Rt 13 kel.Muara Jawa Pesisir MUARA JAWA (Pkr_sab)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Jawa Pesisir	1	Laporan	500.000.000,00	SA''BIR	1	Laporan	500.000.000,00
	Peningkatan badan jalan Gg. PADAIDI Rt 03 Muara Jawa Pesisir MUARA JAWA (Pkr_sab)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Jawa Pesisir	1	Laporan	500.000.000,00	SA''BIR	1	Laporan	500.000.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Kecamatan Muara Jawa	100	Persen	6.767.000.000,00		100	Persen	7.324.800.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kecamatan Muara Jawa	2	Kegiatan	110.000.000,00		2	Kegiatan	235.000.000,00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Muara Jawa	176	Lembaga masyarakat	60.000.000,00		176	Lembaga masyarakat	60.000.000,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Fasilitasi Musrenbang Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Kecamatan Muara Jawa	176	Lembaga masyarakat	60.000.000,00		176	Lembaga masyarakat	60.000.000,00

TABEL 1.C-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kecamatan Muara Jawa	0	Unit	-		0	Unit	-
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Muara Jawa	0	Pokmas/Ormas	-		0	Pokmas/Ormas	-
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Muara Jawa	2	Laporan	50.000.000,00		2	Laporan	175.000.000,00
	Fasilitasi Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Jumlah Laporan	Kecamatan Muara Jawa	1	Laporan	25.000.000,00	Pagu anggaran kurang. Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten adalah Rp.150.000.000,-	1	Laporan	150.000.000,00
	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Laporan	Kecamatan Muara Jawa	1	Laporan	25.000.000,00		1	Laporan	25.000.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kecamatan Muara Jawa	236	Lembaga Kemasyarakatan	6.657.000.000,00		236	Lembaga Kemasyarakatan	7.089.800.000,00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Muara Jawa	400	Lembaga Kemasyarakatan	6.457.000.000,00		400	Lembaga Kemasyarakatan	6.889.800.000,00
	Fasilitasi pelaksanaan HKG PKK Kecamatan Muara Jawa Tingkat Kabupaten	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Muara Jawa	1	Lembaga	150.000.000,00		1	Lembaga	150.000.000,00
	Operasional PKK Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Muara Jawa	1	Lembaga	100.000.000,00		1	Lembaga	100.000.000,00
	Fasilitasi Forum Anak Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Muara Jawa	1	Lembaga	20.000.000,00		1	Lembaga	20.000.000,00
	Honorarium Pengurus RT Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Muara Jawa	148	Lembaga	3.463.200.000,00		148	Lembaga	3.463.200.000,00
	Honor LPM Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Muara Jawa	8	Lembaga	377.600.000,00		8	Lembaga	377.600.000,00
	Honorarium Lembaga Adat Kelurahan Se-Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Muara Jawa	8	Lembaga	420.800.000,00	Pagu anggaran untuk honorarium lembaga adat kelurahan selama 12 bulan kurang, yang dibutuhkan adalah Rp.753.600.000,-	8	Lembaga	753.600.000,00
	Operasional karang taruna Se-Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Muara Jawa	8	Lembaga	80.000.000,00		8	Lembaga	80.000.000,00
	Honor Linmas Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Muara Jawa	111	Orang	666.000.000,00		111	Orang	666.000.000,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Fasilitasi Posyandu (Operasional Posyandu) Se-Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Muara Jawa	55	Posyandu	224.400.000,00		55	Posyandu	224.400.000,00

TABEL T.C-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

	Fasilitasi Lomba Posyandu Tingkat Kecamatan dan kabupaten	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Muara Jawa	2	Kegiatan	50.000.000,00	Pagu anggaran kurang. Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten adalah Rp.150.000.000,-	2	Kegiatan	150.000.000,00
	Honor Kader Posyandu se-Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Muara Jawa	275	Orang	825.000.000,00		275	Orang	825.000.000,00
	Operasional Pokjanal Posyandu Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Muara Jawa	1	Lembaga	50.000.000,00		1	Lembaga	50.000.000,00
	Jambore PAUD Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Muara Jawa	1	Lembaga	30.000.000,00		1	Lembaga	30.000.000,00
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Muara Jawa	2	Lembaga Kemasyarakatan	200.000.000,00		2	Lembaga Kemasyarakatan	200.000.000,00
	Fasilitasi Pramuka Kwaran Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Muara Jawa	1	Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00		1	Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00
	Pengadaan tiang dan umbul-umbul Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Muara Jawa	1	Lembaga Kemasyarakatan	175.000.000,00		1	Lembaga Kemasyarakatan	175.000.000,00
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Disediakan	Kecamatan Muara Jawa	0	Unit	-		0	Unit	-
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Muara Jawa	100	Persen	175.000.000,00		100	Persen	225.000.000,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Muara Jawa	2	Kegiatan	175.000.000,00		2	Kegiatan	225.000.000,00
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kecamatan Muara Jawa	4	Laporan	175.000.000,00		4	Laporan	225.000.000,00
	Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kecamatan Muara Jawa	Jumlah kegiatan	Kecamatan Muara Jawa	3	Kegiatan	75.000.000,00		3	Kegiatan	75.000.000,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Safari Ramadahan di Kecamatan Muara Jawa	Jumlah kegiatan	Kecamatan Muara Jawa	1	Kegiatan	100.000.000,00	Pagu anggaran kurang, biaya yang dibutuhkan adalah Rp.150.000.000,- (makan minum kegiatan dan bingkisan Safari Ramadhan di 8 kelurahan, Safari Ramadhan Tk. Kecamatan)	1	Kegiatan	150.000.000,00

TABEL 1.C-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Muara Jawa	100	Persen	132.701.502,00		100	Persen	500.000.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kecamatan Muara Jawa	11	Kegiatan	132.701.502,00		11	Kegiatan	500.000.000,00
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Muara Jawa	400	Orang	132.701.502,00		400	Orang	500.000.000,00
	Fasilitasi MTQ Tingkat Kecamatan Muara Jawa dan Tingkat Kabupaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Muara Jawa	400	Orang	132.701.502,00	Pagu anggaran kurang, biaya yang dibutuhkan sesuai hasil rapat Pengurus LPTQ Kecamatan dengan Bidang Kesra dan Sekda per Kecamatan membutuhkan minimal Rp.500.000.000,- baik untuk MTQ Tk. Kecamatan maupun Tk. Kabupaten	400	Orang	500.000.000,00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Muara Jawa	0	Dokumen	-		0	Dokumen	-
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0	Dokumen	-		0	Dokumen	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	KELURAHAN MUARA JAWA ILIR		Kelurahan Muara Jawa Ilir			1.900.000.000,00				1.900.000.000,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kelurahan Muara Jawa Ilir	65	Nilai	130.000.000,00		65	Nilai	130.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Muara Jawa Ilir	5	Layanan	63.180.000,00		5	Layanan	63.180.000,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	1	Paket	1.150.000,00		1	Paket	1.150.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	1	Paket	1.150.000,00		1	Paket	1.150.000,00

TABEL 1.C-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	1	Paket	10.590.000,00		1	Paket	10.590.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	1	Paket	10.590.000,00		1	Paket	10.590.000,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	3	Paket	10.000.000,00		3	Paket	10.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	3	Paket	10.000.000,00		3	Paket	10.000.000,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	1	Paket	3.120.000,00		1	Paket	3.120.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	1	Paket	3.120.000,00		1	Paket	3.120.000,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Muara Jawa Ilir	98	Laporan	38.320.000,00		98	Laporan	38.320.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Muara Jawa Ilir	98	Laporan	38.320.000,00		98	Laporan	38.320.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kelurahan Muara Jawa Ilir	6	Unit	33.160.000,00		6	Unit	33.160.000,00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	4	Unit	10.000.000,00		4	Unit	10.000.000,00
	Pengadaan Mebel Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	4	Unit	10.000.000,00		4	Unit	10.000.000,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	2	Unit	23.160.000,00		2	Unit	23.160.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	2	Unit	23.160.000,00		2	Unit	23.160.000,00
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	0	Unit	-		0	Unit	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Muara Jawa Ilir	12	Bulan	16.470.000,00		12	Bulan	16.470.000,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Muara Jawa Ilir	12	Laporan	1.950.000,00		12	Laporan	1.950.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Muara Jawa Ilir	12	Laporan	1.950.000,00		12	Laporan	1.950.000,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	12	Laporan	14.520.000,00		12	Laporan	14.520.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	12	Laporan	14.520.000,00		12	Laporan	14.520.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kelurahan Muara Jawa Ilir	26	Unit	17.190.000,00		26	Unit	17.190.000,00

TABEL 1.C-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kelurahan Muara Jawa Ilir	1	Unit	10.000.000,00		1	Unit	10.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kelurahan Muara Jawa Ilir	1	Unit	10.000.000,00		1	Unit	10.000.000,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Muara Jawa Ilir	25	Unit	7.190.000,00		25	Unit	7.190.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Muara Jawa Ilir	25	Unit	7.190.000,00		25	Unit	7.190.000,00
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Ilir	0	Unit	-		0	Unit	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Muara Jawa Ilir	0	Unit	-		0	Unit	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Kelurahan Muara Jawa Ilir	100	Persen	1.760.000.000,00		100	Persen	1.760.000.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan di Desa/Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	3	Kegiatan	760.000.000,00		3	Kegiatan	760.000.000,00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	5	Lembaga	10.000.000,00		5	Lembaga	10.000.000,00
	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	5	Lembaga	10.000.000,00		5	Lembaga	10.000.000,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Muara Jawa Ilir	3	Unit	450.000.000,00		3	Unit	450.000.000,00
	- Pembuatan Tempat Parkir Kantor Lurah Muara Jawa Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Muara Jawa Ilir	1	Unit	149.320.000,00		1	Unit	149.320.000,00
	- Peningkatan Badan Jalan RT.016 Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Muara Jawa Ilir	1	Unit	150.859.990,00		1	Unit	150.859.990,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	- Pembangunan Posyandu Tenggiri RT.017 Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Muara Jawa Ilir	1 Unit	149.820.010,00		1	Unit	149.820.010,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	7 Pokmas/Ormas	300.000.000,00		7	Pokmas/Ormas	300.000.000,00
	Fasilitasi HUT RI Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	1 Pokmas/Ormas	55.824.000,00		1	Pokmas/Ormas	55.824.000,00
	Operasional PKK Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	1 Pokmas/Ormas	23.678.800,00		1	Pokmas/Ormas	23.678.800,00
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan posyandu Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	4 Pokmas/Ormas	213.774.300,00		4	Pokmas/Ormas	213.774.300,00

TABEL 1.C-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

	Fasilitasi Lomba Kelurahan Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Memberdayakan Kemandirian Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	1	Pokmas/Ormas	6.722.900,00		1	Pokmas/Ormas	6.722.900,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	20	Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000.000,00		20	Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000.000,00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	20	Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000.000,00		20	Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000.000,00
	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Muara Jawa Ilir	20	Lembaga/RT	1.000.000.000,00	Program Dedikasi	20	Lembaga/RT	1.000.000.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kelurahan Muara Jawa Ilir	100	Persen	10.000.000,00		100	Persen	10.000.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Muara Jawa Ilir	1	Kegiatan	10.000.000,00		1	Kegiatan	10.000.000,00
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Muara Jawa Ilir	100	Orang	10.000.000,00		100	Orang	10.000.000,00
	Fasilitasi HUT MTQ Kelurahan Muara Jawa Ilir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Muara Jawa Ilir	100	Orang	10.000.000,00		100	Orang	10.000.000,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH		Kelurahan Muara Jawa Tengah		1.690.000.000,00				1.690.000.000,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kelurahan Muara Jawa Tengah	65 Nilai	130.000.000,00		65	Nilai	130.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Kelurahan Muara Jawa Tengah	4 Layanan	66.780.000,00		4	Layanan	66.780.000,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	0 Paket	-		0	Paket	-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	1 Paket	20.000.000,00		1	Paket	20.000.000,00

TABEL 1.C-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	1	Paket	20.000.000,00		1	Paket	20.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	3	Paket	15.000.000,00		3	Paket	15.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	3	Paket	15.000.000,00		3	Paket	15.000.000,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	1	Paket	1.780.000,00		1	Paket	1.780.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	1	Paket	1.780.000,00		1	Paket	1.780.000,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Muara Jawa Tengah	36	Laporan	30.000.000,00		36	Laporan	30.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Muara Jawa Tengah	36	Laporan	30.000.000,00		36	Laporan	30.000.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	6	Unit	35.000.000,00		6	Unit	35.000.000,00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	0	Unit	-		0	Unit	-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	6	Unit	35.000.000,00		6	Unit	35.000.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	6	Unit	35.000.000,00		6	Unit	35.000.000,00
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	0	Unit	-		0	Unit	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	12	Bulan	13.220.000,00		12	Bulan	13.220.000,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Muara Jawa Tengah	12	Laporan	1.100.000,00		12	Laporan	1.100.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Muara Jawa Tengah	12	Laporan	1.100.000,00		12	Laporan	1.100.000,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	12	Laporan	12.120.000,00		12	Laporan	12.120.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	12	Laporan	12.120.000,00		12	Laporan	12.120.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kelurahan Muara Jawa Tengah	6	Unit	15.000.000,00		6	Unit	15.000.000,00

TABEL T.C-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kelurahan Muara Jawa Tengah	1	Unit	10.000.000,00		1	Unit	10.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kelurahan Muara Jawa Tengah	1	Unit	10.000.000,00		1	Unit	10.000.000,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Muara Jawa Tengah	5	Unit	5.000.000,00		5	Unit	5.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Muara Jawa Tengah	5	Unit	5.000.000,00		5	Unit	5.000.000,00
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Muara Jawa Tengah	0	Unit	-		0	Unit	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Muara Jawa Tengah	0	Unit	-		0	Unit	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Kelurahan Muara Jawa Tengah	100	Persen	1.550.000.000,00		100	Persen	1.550.000.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	2	Kegiatan	750.000.000,00		2	Kegiatan	750.000.000,00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	0	Lembaga	-		0	Lembaga	-
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Muara Jawa Tengah	3	Unit	450.000.000,00		3	Unit	450.000.000,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Peningkatan Badan Jalan Gang Zakky Blok 2 RT.01 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Muara Jawa Tengah	1	Unit	102.500.000,00		1	Unit	102.500.000,00
	Pembangunan Ruang Rapat Kantor Lurah Muara Jawa Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Muara Jawa Tengah	1	Unit	230.000.000,00		1	Unit	230.000.000,00
	Pembuatan Turap Jalan Depan Madrasah RT 11 Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Muara Jawa Tengah	1	Unit	117.500.000,00		1	Unit	117.500.000,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	6	Pokmas/Ormas	300.000.000,00		6	Pokmas/Ormas	300.000.000,00
	Fasilitasi HUT RI Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	1	Pokmas/Ormas	110.290.000,00		1	Pokmas/Ormas	110.290.000,00
	Operasional PKK Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	1	Pokmas/Ormas	25.000.000,00		1	Pokmas/Ormas	25.000.000,00

TABEL T.C-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

	Pengadaan sarana dan prasarana posyandu Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	4	Pokmas/Ormas	164.710.000,00		4	Pokmas/Ormas	164.710.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	16	Lembaga Kemasyarakatan	800.000.000,00		16	Lembaga Kemasyarakatan	800.000.000,00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	16	Lembaga Kemasyarakatan	800.000.000,00		16	Lembaga Kemasyarakatan	800.000.000,00
	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	16	Lembaga/RT	800.000.000,00	Program Dedikasi	16	Lembaga/RT	800.000.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kelurahan Muara Jawa Tengah	100	Persen	10.000.000,00		100	Persen	10.000.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kelurahan Muara Jawa Tengah	1	Kegiatan	10.000.000,00		1	Kegiatan	10.000.000,00
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Muara Jawa Tengah	50	Orang	10.000.000,00		50	Orang	10.000.000,00
	Fasilitasi STQ Kelurahan Muara Jawa Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Muara Jawa Tengah	50	Orang	10.000.000,00		50	Orang	10.000.000,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	KELURAHAN MUARA JAWA ULU		Kelurahan Muara Jawa Ulu			2.899.720.000,00			2.899.720.000,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kelurahan Muara Jawa Ulu	65	Nilai	83.720.000,00	65	Nilai	83.720.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Kelurahan Muara Jawa Ulu	5	Layanan	49.000.000,00	5	Layanan	49.000.000,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	1	Paket	2.000.000,00	1	Paket	2.000.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	1	Paket	2.000.000,00	1	Paket	2.000.000,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	1	Paket	10.000.000,00	1	Paket	10.000.000,00

TABEL 1.C-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	1	Paket	10.000.000,00		1	Paket	10.000.000,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	2	Paket	9.000.000,00		2	Paket	9.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	2	Paket	9.000.000,00		2	Paket	9.000.000,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	1	Paket	1.000.000,00		1	Paket	1.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	1	Paket	1.000.000,00		1	Paket	1.000.000,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Muara Jawa Ulu	27	Laporan	27.000.000,00		27	Laporan	27.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Muara Jawa Ulu	27	Laporan	27.000.000,00		27	Laporan	27.000.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	0	Unit	-		0	Unit	-
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	0	Unit	-		0	Unit	-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	0	Unit	-		0	Unit	-
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	0	Unit	-		0	Unit	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	12	Bulan	15.720.000,00		12	Bulan	15.720.000,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Muara Jawa Ulu	12	Laporan	1.200.000,00		12	Laporan	1.200.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Muara Jawa Ulu	12	Laporan	1.200.000,00		12	Laporan	1.200.000,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	12	Laporan	14.520.000,00		12	Laporan	14.520.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	12	Laporan	14.520.000,00		12	Laporan	14.520.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kelurahan Muara Jawa Ulu	27	Unit	19.000.000,00		27	Unit	19.000.000,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kelurahan Muara Jawa Ulu	1	Unit	10.000.000,00		1	Unit	10.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kelurahan Muara Jawa Ulu	1	Unit	10.000.000,00		1	Unit	10.000.000,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Muara Jawa Ulu	26	Unit	9.000.000,00		26	Unit	9.000.000,00

TABEL T.C-33

RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Muara Jawa Ulu	26	Unit	9.000.000,00		26	Unit	9.000.000,00
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Muara Jawa Ulu	0	Unit	-		0	Unit	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Muara Jawa Ulu	0	Unit	-		0	Unit	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Kelurahan Muara Jawa Ulu	100	Persen	2.806.000.000,00		100	Persen	2.806.000.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	3	Kegiatan	756.000.000,00		3	Kegiatan	756.000.000,00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	50	Lembaga	6.000.000,00		50	Lembaga	6.000.000,00
	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	50	Lembaga	6.000.000,00		50	Lembaga	6.000.000,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Muara Jawa Ulu	3	Unit	450.000.000,00		3	Unit	450.000.000,00
	Pembuatan Drainase Gg Gembira RT 14 Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Muara Jawa Ulu	1	Unit	149.960.000,00		1	Unit	149.960.000,00
	Semenisasi Gg H. Arsad RT 17 Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Muara Jawa Ulu	1	Unit	149.770.000,00		1	Unit	149.770.000,00
	Pembuatan Pandopo/Balai Pertemuan RT 24 Galendrong dock Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Muara Jawa Ulu	1	Unit	150.270.000,00		1	Unit	150.270.000,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	14	Pokmas/Ormas	300.000.000,00		14	Pokmas/Ormas	300.000.000,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Fasilitasi HUT RI Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	1 Pokmas/Ormas	30.045.000,00		1	Pokmas/Ormas	30.045.000,00
	Operasional dan pengadaan perlengkapan PKK Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	1 Pokmas/Ormas	62.315.000,00		1	Pokmas/Ormas	62.315.000,00
	Fasilitasi Lomba Kelurahan- Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	1 Pokmas/Ormas	7.700.000,00		1	Pokmas/Ormas	7.700.000,00
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan posyandu Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	11 Pokmas/Ormas	199.940.000,00		11	Pokmas/Ormas	199.940.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	41 Lembaga/RT	2.050.000.000,00		41	Lembaga/RT	2.050.000.000,00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	41 Lembaga/RT	2.050.000.000,00		41	Lembaga/RT	2.050.000.000,00
	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	41 Lembaga/RT	2.050.000.000,00	Program Dedikasi	41	Lembaga/RT	2.050.000.000,00

TABEL 1.C-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kelurahan Muara Jawa Ulu	100	Persen	10.000.000,00		100	Persen	10.000.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Standar Pelayanan Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kelurahan Muara Jawa Ulu	1	Kegiatan	10.000.000,00		1	Kegiatan	10.000.000,00
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Muara Jawa Ulu	25	Orang	10.000.000,00		25	Orang	10.000.000,00
	Fasilitasi MTQ Kelurahan Muara Jawa Ulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Muara Jawa Ulu	25	Orang	10.000.000,00		25	Orang	10.000.000,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR		Kelurahan Muara Jawa Pesisir		2.496.000.000,00				2.496.000.000,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	65 Nilai	130.000.000,00		65	Nilai	130.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	5 Layanan	68.360.000,00		5	Layanan	68.360.000,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	1 Paket	1.500.000,00		1	Paket	1.500.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	1 Paket	1.500.000,00		1	Paket	1.500.000,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	1 Paket	13.000.000,00		1	Paket	13.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	1 Paket	13.000.000,00		1	Paket	13.000.000,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	3 Paket	15.902.000,00		3	Paket	15.902.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	3 Paket	15.902.000,00		3	Paket	15.902.000,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	1 Paket	2.958.000,00		1	Paket	2.958.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	1 Paket	2.958.000,00		1	Paket	2.958.000,00

TABEL 1.C-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	35	Laporan	35.000.000,00		35	Laporan	35.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	35	Laporan	35.000.000,00		35	Laporan	35.000.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	2	Unit	29.000.000,00		2	Unit	29.000.000,00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	0	Unit	-		0	Unit	-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	2	Unit	29.000.000,00		2	Unit	29.000.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	2	Unit	29.000.000,00		2	Unit	29.000.000,00
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	0	Unit	-		0	Unit	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	12	Bulan	15.820.000,00		12	Bulan	15.820.000,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	12	Laporan	1.300.000,00		12	Laporan	1.300.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	12	Laporan	1.300.000,00		12	Laporan	1.300.000,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	12	Laporan	14.520.000,00		12	Laporan	14.520.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	12	Laporan	14.520.000,00		12	Laporan	14.520.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	6	Unit	16.820.000,00		6	Unit	16.820.000,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	1	Unit	10.000.000,00		1	Unit	10.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	1	Unit	10.000.000,00		1	Unit	10.000.000,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	5	Unit	6.820.000,00		5	Unit	6.820.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	5	Unit	6.820.000,00		5	Unit	6.820.000,00
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	0	Unit	-		0	Unit	-

TABEL 1.C-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	0	Unit	-		0	Unit	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	100	Persen	2.356.000.000,00		100	Persen	2.356.000.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	3	Kegiatan	756.000.000,00		3	Kegiatan	756.000.000,00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	36	Lembaga	6.000.000,00		36	Lembaga	6.000.000,00
	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	36	Lembaga	6.000.000,00		36	Lembaga	6.000.000,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	4	Unit	450.000.000,00		4 Unit	450.000.000,00
	Peningkatan Jalan Gang Pusaka RT.25 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	1	Unit	155.900.000,00		1 Unit	155.900.000,00
	Pembuatan Jembatan Gang Restu Tembus Gang Langgar RT.31 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	1	Unit	90.000.000,00		1 Unit	90.000.000,00
	Pembuatan cor Beton parit perbatasan antara.RT.04 dan RT.03 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	1	Unit	140.000.000,00		1 Unit	140.000.000,00
	Pemasangan Paving Halaman Kantor Lurah Muara Jawa Pesisir RT.23 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	1	Unit	64.100.000,00		1 Unit	64.100.000,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	10	Pokmas/Ormas	300.000.000,00		10 Pokmas/Ormas	300.000.000,00
	Operasional PKK Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	1	Pokmas/Ormas	20.904.000,00		1 Pokmas/Ormas	20.904.000,00
	Pengadaan seragam PKK Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	1	Pokmas/Ormas	24.398.000,00		1 Pokmas/Ormas	24.398.000,00
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan posyandu Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	7	Pokmas/Ormas	228.901.000,00		7 Pokmas/Ormas	228.901.000,00
	Partisipasi HUT RI Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	1	Pokmas/Ormas	25.797.000,00		1 Pokmas/Ormas	25.797.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	32	Lembaga/RT	1.600.000.000,00		32 Lembaga/RT	1.600.000.000,00

TABEL 1.C-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	32	Lembaga/RT	1.600.000.000,00		32	Lembaga/RT	1.600.000.000,00
	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	32	Lembaga/RT	1.600.000.000,00	Program Dedikasi	32	Lembaga/RT	1.600.000.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	100	Persen	10.000.000,00		100	Persen	10.000.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	11	Kegiatan	10.000.000,00		11	Kegiatan	10.000.000,00
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	50	Orang	10.000.000,00		50	Orang	10.000.000,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Fasilitasi MTQ Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	50 Orang	10.000.000,00		50	Orang	10.000.000,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	KELURAHAN TELUK DALAM		Kelurahan Teluk Dalam		1.239.620.000,00				1.239.620.000,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kelurahan Teluk Dalam	65	Nilai	121.620.000,00	65	Nilai	121.620.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Teluk Dalam	5	Layanan	44.700.000,00	5	Layanan	44.700.000,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Teluk Dalam	1	Paket	1.500.000,00	1	Paket	1.500.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Teluk Dalam	1	Paket	1.500.000,00	1	Paket	1.500.000,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Teluk Dalam	3	Paket	12.000.000,00	3	Paket	12.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Teluk Dalam	3	Paket	12.000.000,00	3	Paket	12.000.000,00

TABEL T.C-33

RINCIAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Teluk Dalam	8	Paket	8.000.000,00	8	Paket	8.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Teluk Dalam	8	Paket	8.000.000,00	8	Paket	8.000.000,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Teluk Dalam	1	Paket	1.500.000,00	1	Paket	1.500.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Teluk Dalam	1	Paket	1.500.000,00	1	Paket	1.500.000,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Teluk Dalam	26	Laporan	21.700.000,00	26	Laporan	21.700.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Teluk Dalam	26	Laporan	21.700.000,00	26	Laporan	21.700.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Kelurahan Teluk Dalam	7	Unit	41.400.000,00	7	Unit	41.400.000,00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Teluk Dalam	0	Unit	-	0	Unit	-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Teluk Dalam	7	Unit	41.400.000,00	7	Unit	41.400.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Teluk Dalam	7	Unit	41.400.000,00	7	Unit	41.400.000,00
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Teluk Dalam	0	Unit	-	0	Unit	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kelurahan Teluk Dalam	12	Bulan	17.120.000,00	12	Bulan	17.120.000,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Teluk Dalam	12	Laporan	2.600.000,00	12	Laporan	2.600.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Teluk Dalam	12	Laporan	2.600.000,00	12	Laporan	2.600.000,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Teluk Dalam	12	Laporan	14.520.000,00	12	Laporan	14.520.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Teluk Dalam	12	Laporan	14.520.000,00	12	Laporan	14.520.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kelurahan Teluk Dalam	9	Unit	18.400.000,00	9	Unit	18.400.000,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kelurahan Teluk Dalam	1	Unit	10.000.000,00	1	Unit	10.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kelurahan Teluk Dalam	1	Unit	10.000.000,00	1	Unit	10.000.000,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Teluk Dalam	8	Unit	8.400.000,00	8	Unit	8.400.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Teluk Dalam	8	Unit	8.400.000,00	8	Unit	8.400.000,00

TABEL T.C-33

RANCANGAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Teluk Dalam	0	Unit	-		0	Unit	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Teluk Dalam	0	Unit	-		0	Unit	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Kelurahan Teluk Dalam	100	Persen	1.108.000.000,00		100	Persen	1.108.000.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kelurahan Teluk Dalam	3	Kegiatan	758.000.000,00		3	Kegiatan	758.000.000,00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Teluk Dalam	11	Lembaga	8.000.000,00		11	Lembaga	8.000.000,00
	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Teluk Dalam	11	Lembaga	8.000.000,00		11	Lembaga	8.000.000,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Teluk Dalam	7	Unit	450.000.000,00		7	Unit	450.000.000,00
	Lanjutan pembangunan poskamling RT.03 Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Teluk Dalam	1	Unit	51.360.000,00		1	Unit	51.360.000,00
	Pelebaran Poskamling RT.02 Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Teluk Dalam	1	Unit	30.000.000,00		1	Unit	30.000.000,00
	Pembangunan Poskamling RT. 07 Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Teluk Dalam	1	Unit	49.320.000,00		1	Unit	49.320.000,00
	Rehab WC pelabuhan RT. 01 Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Teluk Dalam	1	Unit	30.000.000,00		1	Unit	30.000.000,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Lanjutan Pembangunan Kantor Lurah Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Teluk Dalam	1 Unit	164.320.000,00		1	Unit	164.320.000,00
	Pembangunan turap RT. 05 Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Teluk Dalam	1 Unit	65.000.000,00		1	Unit	65.000.000,00
	Semenisasi Gang Pelabuhan RT. 04 Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Teluk Dalam	1 Unit	60.000.000,00		1	Unit	60.000.000,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Teluk Dalam	11 Pokmas/Ormas	300.000.000,00		11	Pokmas/Ormas	300.000.000,00
	Fasilitasi Kegiatan Lomba Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Teluk Dalam	1 Pokmas/Ormas	12.870.400,00		1	Pokmas/Ormas	12.870.400,00
	Fasilitasi Kegiatan Lomba Posyandu Kel. Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Teluk Dalam	1 Pokmas/Ormas	8.740.400,00		1	Pokmas/Ormas	8.740.400,00

TABEL 1.C-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

	Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Teluk Dalam	1	Pokmas/Ormas	14.834.200,00		1	Pokmas/Ormas	14.834.200,00
	Partisipasi HUT RI Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Teluk Dalam	1	Pokmas/Ormas	10.252.000,00		1	Pokmas/Ormas	10.252.000,00
	Pembuatan Turap Halaman Masjid Al Fallah Kel. Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Teluk Dalam	1	Pokmas/Ormas	57.040.000,00		1	Pokmas/Ormas	57.040.000,00
	Pengadaan Meubelair Posyandu Bawal I dan II Kel. Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Teluk Dalam	2	Pokmas/Ormas	25.922.000,00		2	Pokmas/Ormas	25.922.000,00
	Pengadaan Meubelair Kantor LPM Kel. Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Teluk Dalam	1	Pokmas/Ormas	20.341.000,00		1	Pokmas/Ormas	20.341.000,00
	Rehab Atap Langgar Assalam RT.06 Kel. Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Teluk Dalam	1	Pokmas/Ormas	55.000.000,00		1	Pokmas/Ormas	55.000.000,00
	Pemeliharaan Kantor LPM Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Teluk Dalam	1	Pokmas/Ormas	33.640.000,00		1	Pokmas/Ormas	33.640.000,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pemeliharaan Gedung BPU Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Teluk Dalam	1	Pokmas/Ormas	61.360.000,00		1	Pokmas/Ormas	61.360.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kelurahan Teluk Dalam	7	Lembaga/RT	350.000.000,00		7	Lembaga/RT	350.000.000,00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Teluk Dalam	7	Lembaga/RT	350.000.000,00		7	Lembaga/RT	350.000.000,00
	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Teluk Dalam	7	Lembaga/RT	350.000.000,00	Program Dedikasi	7	Lembaga/RT	350.000.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kelurahan Teluk Dalam	100	Persen	10.000.000,00		100	Persen	10.000.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kelurahan Teluk Dalam	11	Kegiatan	10.000.000,00		11	Kegiatan	10.000.000,00
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Teluk Dalam	60	Orang	10.000.000,00		60	Orang	10.000.000,00

TABEL T.C-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

	Fasilitasi HUT RI dan MTQ Kelurahan Teluk Dalam	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Teluk Dalam	60	Orang	10.000.000,00		60	Orang	10.000.000,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	KELURAHAN DONDANG		Kelurahan Dondang			1.560.000.000,00				1.560.000.000,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kelurahan Dondang	65	Nilai	100.000.000,00		65	Nilai	100.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Dondang	4	Layanan	50.240.000,00		4	Layanan	50.240.000,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Dondang	0	Paket	-		0	Paket	-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Dondang	1	Paket	11.000.000,00		1	Paket	11.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Dondang	1	Paket	11.000.000,00		1	Paket	11.000.000,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Dondang	1	Paket	11.000.000,00		1	Paket	11.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Dondang	1	Paket	11.000.000,00		1	Paket	11.000.000,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Dondang	1	Paket	2.000.000,00		1	Paket	2.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Dondang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Dondang	1	Paket	2.000.000,00		1	Paket	2.000.000,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Dondang	32	Laporan	26.240.000,00		32	Laporan	26.240.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Dondang	32	Laporan	26.240.000,00		32	Laporan	26.240.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Kelurahan Dondang	2	Unit	15.460.000,00		2	Unit	15.460.000,00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Dondang	0	Unit	-		0	Unit	-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Dondang	2	Unit	15.460.000,00		2	Unit	15.460.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Dondang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Dondang	2	Unit	15.460.000,00		2	Unit	15.460.000,00
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Dondang	0	Unit	-		0	Unit	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kelurahan Dondang	12	Bulan	15.760.000,00		12	Bulan	15.760.000,00

TABEL T.C-33

RANCANGAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Dondang	12	Laporan	1.240.000,00		12	Laporan	1.240.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Dondang	12	Laporan	1.240.000,00		12	Laporan	1.240.000,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Dondang	12	Laporan	14.520.000,00		12	Laporan	14.520.000,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Dondang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Dondang	12	Laporan	14.520.000,00		12	Laporan	14.520.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kelurahan Dondang	15	Unit	18.540.000,00		15	Unit	18.540.000,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kelurahan Dondang	1	Unit	10.000.000,00		1	Unit	10.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Dondang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kelurahan Dondang	1	Unit	10.000.000,00		1	Unit	10.000.000,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Dondang	14	Unit	8.540.000,00		14	Unit	8.540.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Dondang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Dondang	14	Unit	8.540.000,00		14	Unit	8.540.000,00
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Dondang	0	Unit	-		0	Unit	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Dondang	0	Unit	-		0	Unit	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Kelurahan Dondang	100	Persen	1.450.000.000,00		100	Persen	1.450.000.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kelurahan Dondang	4	Kegiatan	750.000.000,00		4	Kegiatan	750.000.000,00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Dondang	0	Lembaga	-		0	Lembaga	-
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Dondang	3	Unit	450.000.000,00		3	Unit	450.000.000,00
	Lanjutan Pembuatan Pagar Kantor kelurahan Dondang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Dondang	1	Unit	153.560.000,00		1	Unit	
	Pembuatan Gedung Karang Taruna Kelurahan Dondang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Dondang	1	Unit	156.120.000,00		1	Unit	
	Lanjutan Pemasangan Paving Halaman kantor Kelurahan Dondang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Dondang	1	Unit	140.320.000,00		1	Unit	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dondang	5	Pokmas/Ormas	300.000.000,00		5	Pokmas/Ormas	300.000.000,00

TABEL 1.C-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

	Operasional PKK Kelurahan Dondang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dondang	1	Pokmas/Ormas	34.589.800,00		1	Pokmas/Ormas	
	Operasional PKK Kelurahan Dondang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dondang	1	Pokmas/Ormas	55.940.000,00		1	Pokmas/Ormas	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Fasilitasi Lomba Kelurahan-Kelurahan Dondang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dondang	1	Pokmas/Ormas	3.700.000,00		1	Pokmas/Ormas	
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan posyandu Kelurahan Dondang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dondang	2	Pokmas/Ormas	205.770.200,00		2	Pokmas/Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kelurahan Dondang	14	Lembaga/RT	700.000.000,00		14	Lembaga/RT	700.000.000,00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Dondang	14	Lembaga/RT	700.000.000,00		14	Lembaga/RT	700.000.000,00
	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Dondang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Dondang	14	Lembaga/RT	700.000.000,00	Program Dedikasi	14	Lembaga/RT	700.000.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kelurahan Dondang	100	Persen	10.000.000,00		100	Persen	10.000.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kelurahan Dondang	11	Kegiatan	10.000.000,00		11	Kegiatan	10.000.000,00
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Dondang	25	Orang	10.000.000,00		25	Orang	10.000.000,00
	Fasilitasi MTQ Kelurahan Dondang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Dondang	25	Orang	10.000.000,00		25	Orang	10.000.000,00

	KELURAHAN TAMA POLE		Kelurahan Tama Pole			1.035.000.000,00				1.035.000.000,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kelurahan Tama Pole	65	Nilai	125.000.000,00		65	Nilai	125.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Kelurahan Tama Pole	5	Layanan	65.480.000,00		5	Layanan	65.480.000,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tama Pole	1	Paket	1.500.000,00		1	Paket	1.500.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Tama Pole	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tama Pole	1	Paket	1.500.000,00		1	Paket	1.500.000,00

TABEL 1.C-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tama Pole	1	Paket	12.990.000,00		1	Paket	12.990.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Tama Pole	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tama Pole	1	Paket	12.990.000,00		1	Paket	12.990.000,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tama Pole	1	Paket	12.990.000,00		1 Paket	12.990.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Tama Pole	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tama Pole	1	Paket	12.990.000,00		1 Paket	12.990.000,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Tama Pole	1	Paket	3.000.000,00		1 Paket	3.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Tama Pole	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Tama Pole	1	Paket	3.000.000,00		1 Paket	3.000.000,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Tama Pole	42	Laporan	35.000.000,00		42 Laporan	35.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Tama Pole	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Tama Pole	42	Laporan	35.000.000,00		42 Laporan	35.000.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Kelurahan Tama Pole	5	Unit	25.000.000,00		5 Unit	25.000.000,00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Tama Pole	0	Unit	-		0 Unit	-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Tama Pole	5	Unit	25.000.000,00		5 Unit	25.000.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Tama Pole	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Tama Pole	5	Unit	25.000.000,00		5 Unit	25.000.000,00
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Tama Pole	0	Unit	-		0 Unit	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kelurahan Tama Pole	12	Bulan	16.520.000,00		12 Bulan	16.520.000,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Tama Pole	12	Laporan	2.000.000,00		12 Laporan	2.000.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Tama Pole	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Tama Pole	12	Laporan	2.000.000,00		12 Laporan	2.000.000,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tama Pole	12	Laporan	14.520.000,00		12 Laporan	14.520.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Tama Pole	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tama Pole	12	Laporan	14.520.000,00		12 Laporan	14.520.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kelurahan Tama Pole	19	Unit	18.000.000,00		19 Unit	18.000.000,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kelurahan Tama Pole	4	Unit	10.000.000,00		4 Unit	10.000.000,00

TABEL 1.C-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Tama Pole	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kelurahan Tama Pole	4	Unit	10.000.000,00		4	Unit	10.000.000,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Tama Pole	15	Unit	8.000.000,00		15	Unit	8.000.000,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Tama Pole	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Tama Pole	15 Unit	8.000.000,00		15	Unit	8.000.000,00
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Tama Pole	0 Unit	-		0	Unit	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Tama Pole	0 Unit	-		0	Unit	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Kelurahan Tama Pole	100 Persen	900.000.000,00		100	Persen	900.000.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kelurahan Tama Pole	3 Kegiatan	750.000.000,00		3	Kegiatan	750.000.000,00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Tama Pole	0 Lembaga	-		0	Lembaga	-
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Tama Pole	3 Unit	450.000.000,00		3	Unit	450.000.000,00
	Lanjutan Semenisasi Jalan Suka Damai Rt 02 Kelurahan Tama Pole	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Tama Pole	1 Unit	148.900.000,00		1	Unit	148.900.000,00
	Pembuatan Pendopo Nelayan Danau Kering RT 03 Kelurahan Tama Pole	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Tama Pole	1 Unit	147.000.000,00		1	Unit	147.000.000,00
	Lanjutan Semenisasi Jalan Hasbullah Menuju Jalan Berkah RT 01 Kelurahan Tama Pole	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Tama Pole	1 Unit	154.100.000,00		1	Unit	154.100.000,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tama Pole	4 Pokmas/Ormas	300.000.000,00		4	Pokmas/Ormas	300.000.000,00
	Operasional PKK Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tama Pole	1 Pokmas/Ormas	15.000.000,00		1	Pokmas/Ormas	15.000.000,00
	Partisipasi HUT RI Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tama Pole	1 Pokmas/Ormas	20.000.000,00		1	Pokmas/Ormas	20.000.000,00
	Pengadaan perahu ketinting untuk Kelompok Nelayan Cahaya Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tama Pole	1 Pokmas/Ormas	65.000.000,00		1	Pokmas/Ormas	65.000.000,00
	Peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tama Pole	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tama Pole	1 Pokmas/Ormas	200.000.000,00		1	Pokmas/Ormas	200.000.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kelurahan Tama Pole	3 Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000,00		3	Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000,00

7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Tama Pole	3	Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000,00		3	Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000,00
	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Tama Pole	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Tama Pole	3	Lembaga/RT	150.000.000,00	Program Dedikasi	3	Lembaga/RT	150.000.000,00

TABEL 1.C-33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kelurahan Tama Pole	100	Persen	10.000.000,00		100	Persen	10.000.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kelurahan Tama Pole	1	Kegiatan	10.000.000,00		1	Kegiatan	10.000.000,00
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Tama Pole	50	Orang	10.000.000,00		50	Orang	10.000.000,00
	Fasilitasi MTQ Kelurahan Tama Pole	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Tama Pole	50	Orang	10.000.000,00		50	Orang	10.000.000,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	KELURAHAN MUARA KEMBANG		Kelurahan Muara Kembang			1.641.000.000,00			1.641.000.000,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kelurahan Muara Kembang	65	Nilai	121.000.000,00		65	Nilai	121.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Muara Kembang	5	Layanan	64.880.000,00		5	Layanan	64.880.000,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Kembang	1	Paket	4.000.000,00		1	Paket	4.000.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Kembang	1	Paket	4.000.000,00		1	Paket	4.000.000,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Kembang	1	Paket	14.400.000,00		1	Paket	14.400.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Kembang	1	Paket	14.400.000,00		1	Paket	14.400.000,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Kembang	1	Paket	12.403.000,00		1	Paket	12.403.000,00

TABEL 1.C-33

RANCANGAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Kembang	1	Paket	12.403.000,00		1	Paket	12.403.000,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Muara Kembang	1	Paket	2.077.000,00		1	Paket	2.077.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Muara Kembang	1	Paket	2.077.000,00		1	Paket	2.077.000,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Muara Kembang	40	Laporan	32.000.000,00		40	Laporan	32.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Muara Kembang	40	Laporan	32.000.000,00		40	Laporan	32.000.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Kelurahan Muara Kembang	2	Unit	25.000.000,00		2	Unit	25.000.000,00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Muara Kembang	0	Unit	-		0	Unit	-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Muara Kembang	2	Unit	25.000.000,00		2	Unit	25.000.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Muara Kembang	2	Unit	25.000.000,00		2	Unit	25.000.000,00
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Muara Kembang	0	Unit	-		0	Unit	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kelurahan Muara Kembang	12	Bulan	16.120.000,00		12	Bulan	16.120.000,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Muara Kembang	12	Laporan	1.600.000,00		12	Laporan	1.600.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Muara Kembang	12	Laporan	1.600.000,00		12	Laporan	1.600.000,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Kembang	12	Laporan	14.520.000,00		12	Laporan	14.520.000,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Muara Kembang	12	Laporan	14.520.000,00	12	Laporan	14.520.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kelurahan Muara Kembang	8	Unit	15.000.000,00	8	Unit	15.000.000,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kelurahan Muara Kembang	1	Unit	10.000.000,00	1	Unit	10.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kelurahan Muara Kembang	1	Unit	10.000.000,00	1	Unit	10.000.000,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Muara Kembang	7	Unit	5.000.000,00	7	Unit	5.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Muara Kembang	7	Unit	5.000.000,00	7	Unit	5.000.000,00
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Muara Kembang	0	Unit	-	0	Unit	-

TABEL T.C-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Muara Kembang	0	Unit	-		0	Unit	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Kelurahan Muara Kembang	100	Persen	1.510.000.000,00		100	Persen	1.510.000.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kelurahan Muara Kembang	4	Kegiatan	760.000.000,00		4	Kegiatan	760.000.000,00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Muara Kembang	19	Lembaga	10.000.000,00		19	Lembaga	10.000.000,00
	Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Muara Kembang	19	Lembaga	10.000.000,00		19	Lembaga	10.000.000,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Muara Kembang	5	Unit	450.000.000,00		5	Unit	450.000.000,00
	Peningkatan Badan Jalan Petinggi Bahran Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Muara Kembang	1	Unit	96.898.000,00		1	Unit	96.898.000,00
	Pembuatan Gudang Kantor Lurah Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Muara Kembang	1	Unit	80.898.000,00		1	Unit	80.898.000,00
	Pembuatan turap jalan Kantor Lurah Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Muara Kembang	1	Unit	91.698.000,00		1	Unit	91.698.000,00
	Pembuatan Jembatan RT.11 Muara Pegah Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Muara Kembang	1	Unit	85.898.000,00		1	Unit	85.898.000,00
	Pembuatan Turap Kuburan Muslimin Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Muara Kembang	1	Unit	94.608.000,00		1	Unit	94.608.000,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Kembang	8	Pokmas/Ormas	300.000.000,00	8	Pokmas/Ormas	300.000.000,00
	Operasional PKK Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Kembang	1	Pokmas/Ormas	46.722.500,00	1	Pokmas/Ormas	46.722.500,00
	Partisipasi HUT RI Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Kembang	1	Pokmas/Ormas	29.510.000,00	1	Pokmas/Ormas	29.510.000,00
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan posyandu Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Kembang	4	Pokmas/Ormas	101.447.500,00	4	Pokmas/Ormas	101.447.500,00
	Pengadaan sarana dan prasarana UMKM Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Kembang	1	Pokmas/Ormas	58.162.500,00	1	Pokmas/Ormas	58.162.500,00
	Pengadaan sarana dan prasarana TK dan PAUD Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Kembang	1	Pokmas/Ormas	64.157.500,00	1	Pokmas/Ormas	64.157.500,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kelurahan Tama Pole	15	Lembaga/RT	750.000.000,00	15	Lembaga/RT	750.000.000,00

TABEL T.C-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA

7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Muara Kembang	15	Lembaga/RT	750.000.000,00		15	Lembaga/RT	750.000.000,00
	Program Pembangunan Berbasis RT Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Muara Kembang	15	Lembaga/RT	750.000.000,00	Program Dedikasi	15	Lembaga/RT	750.000.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kelurahan Muara Kembang	100	Persen	10.000.000,00		100	Persen	10.000.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kelurahan Muara Kembang	1	Kegiatan	10.000.000,00		1	Kegiatan	10.000.000,00
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Muara Kembang	50	Orang	10.000.000,00		50	Orang	10.000.000,00
	Fasilitasi MTQ Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Muara Kembang	50	Orang	10.000.000,00		50	Orang	10.000.000,00

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana strategis Kecamatan Muara Jawa Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun.

Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan Program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Muara Jawa.

A. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Kecamatan Muara Jawa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Muara Jawa merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotesme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya. Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui APBD-P tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

B. Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja Kecamatan Muara Jawa dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

a. Kecamatan Muara Jawa berkewajiban untuk mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RPJMD Kab. Kutai Kartanega Tahun 2021-2026.

b. Kecamatan Muara Jawa berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2024 dan RPJMD Kab. Kutai Kartanega Tahun 2021-2026.

c. Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

C. Rencana tindak lanjut

Kecamatan Muara Jawa pada tahun 2025 mendatang akan menetapkan 5 Program, 12 Kegiatan, 56 Sub Kegiatan sesuai dengan program yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2024 Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) Tahun kedepan. tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan yang sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Kecamatan Muara Jawa ini juga masih terdapat kekurang-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya berupa dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samboja dipakai sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Samboja yang selanjutnya akan dipakai sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Samboja. Muatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome.*

Rencana Kerja Kecamatan Samboja Tahun 2025 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu, b) Rumusan status kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini, c) Rumusan peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan Renja, d) Rumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan, e) pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana, f) rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja, g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan, h) prakiraan maju pendanaan untuk tahun berikutnya, i) kejelasan siapa yang

bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran. Melalu pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan kerangka berfikir yang komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan melalui a) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, b) kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur Pemerintah dan non pemerintah, c) keterwakilan yang mewadai dari seluruh segmen masyarakat terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal, d) berperan aktif pada pelaksanaan musrenbang RKPD dari segi penerapan perencanaan partisipatif, e) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan serta prioritas program.

Pendekatan politis, penyusunan Renja Kecamatan Samboja mengacu pada RKPD dan RPJMD yang merupakan bentuk konsekuensi politis antara Bupati/Wakil Bupati terpilih. Pendekatan ini juga tercermin pada keterlibatan aktif DPRD dalam musrenbang Kecamatan dan kabupaten termasuk hasil sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD, kemudian dokumen RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan sampai RAPBD.

Pendekatan top down, perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui rapat koordinasi dan musrenbang mulai tingkat nasional, provinsi dan kabupaten juga tujuan *globalMDGs*. Pendekatan ini tercermin pada:

a. sinergi dengan program prioritas nasionaldan daerah;
b. konsisten pada RPJMD; RKPD dan Renstra Kecamatan Samboja, Konsisten dengan dokumen RTRW daerah; dan
c. penanganan masalah dengan pendekatan holistic dan pendekatan sistem.

Pendekatan *bottom-up,* perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dan diselaraskan melalui musrenbang, konsisten terhadap visi misi RPJMD serta kesepakatan masyarakat tentang prioritas pembangunan dan hasil forum SKPD.

Penyusunan Renja ini disesuaikan dengan Permendagri 54 Tahun

2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja ini memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kecamatan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9 Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10 Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

14 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

15 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

16 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Samboja;
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Samboja.

1.3.2 Tujuan

1. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Samboja Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025;
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;

3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Samboja dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Samboja Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD dan Renstra Perangkat Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN SAMBOJA
TAHUN LALU

Penyusunan dan Pelaksanaan Renja mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan serta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Adapun tugas pokok dan fungsi dari Kantor Kecamatan Samboja adalah:

A. Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Fungsi Utama

1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan;
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasiltas pelayanan umum;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
10. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
11. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan, pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan - kegiatan lain di lingkungan

Kecamatan;

12. Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan serta Lembaga Kemasyarakatan

C. Indikator Kinerja Utama

Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan oleh Kecamatan Samboja adalah pengkuruan dalam bentuk indeks berskala 1 s.d 10 yang merupakan rata-rata kumulatif capaian indikator pada 10 (Sepuluh) sasaran strategis pada persepektif pemangku kepentingan. Semakin tinggi nilai tingkat keberhasilan, menunjukkan bahwa semakin baik kinerja Kecamatan Samboja secara keseluruhan perspektif pemangku kepentingan.

Adapun Target atas Indikator Keberhasilan atau IKU (Indikator Kinerja Utama) ini terdapat IKU dengan target 0 (Nol) karena pada Indikator tersebut telah di laksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 dan di tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	75	75	75	75	75
		Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	80	80	80	90	90
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	100	0	0	0	0
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	75	75	75	75	75

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program/kegiatan, dikarenakan ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi serta perencanaan penganggaran biaya yang belum sesuai kebutuhan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Samboja tidak efektif dan efisiennya penggunaan anggaran dikarenakan perencanaan dan penganggaran yang belum

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi mengakibatkan tujuan dan sasaran tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya

Untuk tahun berikutnya perencanaan dan penganggaran perlu di seduaikan dengan kebutuhan yang sangat mendesak sehingga Anggaran dapat di relisasikan sesuai dengan target. dan diperlukan komitmen pimpinan dalam mengarahkan tim penyusunan program dan kegiatan dan bersama –sama dengan seksi yang lain.

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra

Evaluasi Anggaran Kecamatan Samboja tahun lalu (2023) secara rincian dapat dilihat ada Tabel 2.1 / Tabel T-C.29 dibawah ini:

TC .29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kecamatan : Samboja

KODE					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Progrram dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
										Target Renja-PD tahun (2021)	Realisasi Renja-PD tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja-PD tahun (2022)	Realisasi Renja-PD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12(11/10)	13	14	15 (14/13)	16	17=(6+8+11+14)	18=(17/5)
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	75	85	80	0	0.0%	65	65	100%	75	85	85%	75	75	100%
						Tingkat Aksesibilitas	Persen	100	81.88	90	100	100 %	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%

						WIlayah Kecamatan														
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kali	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%

7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	SPM	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
7	01	02	2.02	01	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kali	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan	Kali	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%

					Pelayanan Umum	Prasarana Pelayanan Umum														
7	0 1	0 2	2. 0 3	0 2	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
7	0 1	0 2	2. 0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	150	0	150	21	14%	150	339	226%	150	379	253%	98	739	170%
7	0 1	0 2	2. 0 4	0 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Berkas	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
7	0 1	0 2	2. 0 4	0 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Berkas	400	0	400	400	100 %	400	400	100%	400	404	101%	12	1216	304%
7	0 1	0 2	2. 0 4	0 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan	kegiatan	149	0	149	149	100 %	149	338	227%	149	378	254%	97	962	646%

					Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lain yang Dilimpahkan													
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	72.7	0	72.7	72.7	100 %	72.7	72.7	100%	72.7	72.7	100%	72.7	72.7	100%
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100%	0	0	0%
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100%	0	0	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100%	0	0	0%
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	80	0	80	70	87.50%	80	80	100.00%	80	202	253%	80	352	187.5 %

7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang	750	0	700	130	18.57%	700	375	53.57%	700	557	79.57%	100	1062	141.60%
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	159	0	159	159	100%	159	159	100%	159	198	124.53%	159	516	325%
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Orang/ Unit	356	0	356	356	100%	356	346	97%	356	264	74.16%	356	966	271%
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kegiatan	4	0	4	4	100%	4	3	75%	4	2	50.00%	5	9	180%
7	01	03	2		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	470	0	467	448	100%	467	346	74%	410	468	114%	53	1315	182%
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga	467	0	467	448	100%	466	346	74%	410	467	114%	50	1311	2622%
7	1	3	203	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakat	Lembaga	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%

					Kemasyarakatan	an yang Ditingkatkan Kapasitasnya														
7	1	3	203	3	Penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	3	0	3	3	100%	3	3	100%	3	62	2067%	3	71	2367%
X	XX	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60	0	65	0	0%	68%	0%	0%	68	68	100%	70	70	116.67%
X	XX	01.	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	3	0	4	4	100%	4	3	75%	3	2	67%	4	13	433%
X	XX	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	1	0	2	2	100%	1	1	100%	1	2	200%	2	7	700%
X	XX	01.	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	laporan	2	0	2	2	100%	2	2	100%	2	0	0%	2	6	300%

						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
X	XX	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	laporan	21	0	21	21	100 %	21	21	100%	21	21	100%	14	21	100%
X	XX	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	168	173	168	170	101 %	168	168	100%	2016	1876	93%	120	2507	1492 %
X	XX	01.	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	0	1	0	0%	1	1	100%	1	1	100%	1	3	300%
X	XX	01.	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	laporan	20	0	20	20	100 %	20	20	100%	20	20	100%	12	72	360%

						Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD														
X	XX	01.	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Unit	6	0	6	6	100%	6	6	100%	1046	1030	98%	1030	6	100%
X	XX	01.	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	6	0	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	2	20	333%
X	XX	01.	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Orang	20	0	20	6	300%	20	70	350%	200	232	116%	54	362	1810%
X	XX	01.	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0%	0	0	0%	180	212	118%	34	246	724%
X	XX	01.	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	orang	20	0	20	0	0%	70	70	100%	20	20	100%	20	110	550%

					Perundang-Undangan	Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
X	XX	01.	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	6	0	6	6	100 %	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%
X	XX	01.	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	162	0	162	162	100 %	162	162	100%	162	125	77%	59	508	314%
X	XX	01.	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	367	0	367	367	100 %	367	367	100%	367	424	116%	107	1265	345%
X	XX	01.	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	25	0	25	25	100 %	25	25	100%	25	102	408%	20	172	688%
X	XX	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	0	20	20	100 %	20	20	100%	20	20	100%	202	262	1310 %
X	XX	01.	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	268,695	0	268,695	268,695	100 %	268,695	268,695	100%	268,695	399,995	149%	79	937464	349%

X	XX	01.	2.06	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1655	0	1655	1665	100%	1665	1431	86%	1655	1681	102%	718	5495	332%
X	XX	01.	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit	96	0	96	96	100%	96	167	174%	96	245	255%	52	560	583%
X	XX	1	0.09	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0%	0	0	0%	3	7	233%	0	7	233%
X	XX	01.	2.07	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	0	1	1	100%	1	1	100%	2	6	300%	1	9	900%
X	XX	1	0.09	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0%	0	0	0%	5	5	100%	0	5	100%
X	XX	01.	2.07	04	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	95	0	95	95	100%	95	166	175%	95	227	239%	51	539	567%

X	XX	01.	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12	0	12	12	100 %	12	12	100%	12	12	100%	12	48	400%
X	XX	01.	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	0	12	12	100 %	12	12	100%	12	12	100%	12	48	400%
X	XX	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	0	12	12	100 %	12	12	100%	12	12	100%	12	48	400%
X	XX	01.	2.08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	0	12	12	100 %	12	12	100%	12	12	100%	12	48	400%
X	XX	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	unit	150	0	150	100	67%	150	86	57%	94	122	130%	96	404	269%
X	XX	01.	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas	unit	8	0	8	2	25%	8	2	25%	2	2	100%	8	14	175%

					Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya															
X	XX	01.	2.09	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	133	0	133	100	75%	133	74	56%	80	107	134%	85	366	275%
X	XX	01.	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	8	0	9	9	100 %	9	8	89%	9	10	111%	3	30	375%
X	XX	01.	2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100%	0	2	100%
X	XX	01.	2.09	11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	0	1	100%

					Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi														

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagaian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Samboja namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Samboja dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar.
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat.
3. Pelayanan yang bersifat penyedian data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Kelurahan dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Samboja selama kurun waktu tahun 2021 – 2026, yakni ada 4 Indikator Kinerja Utama

1. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP
3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan
4. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa

Untuk Indikator Sasaran Poin 3 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan bukan lagi kewenangan kecamatan dari Tahun 2022 sudah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Samboja, dapat dilihat pada tabel 2.2 / Tabel T-C.30 dibawah ini :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Samboja

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	TAHUN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
1	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			75	75	75	75	75	0	75	92,12	75	75	
2	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			80	80	83	90	90	90.75%	85.83	75	83	90	
3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan			0	0	0	0	0	173.94	0	0	0	0	
4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa			75	75	75	75	75	0	49%	82,61	75	75	

Untuk Tahun 2024 masih berjalan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

1. Permasalahan

Permasalahan Kecamatan Samboja dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemahnya/belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan dan keamanan wilayah yang disebabkan :

a. Kualitas SDM yang belum memadai;
b. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
c. Terbatasnya Anggaran Pembangunan Skala Kecil Kecamatan;
d. Belum optimalnya peran Masyarakat dalam pembangunan.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Samboja secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Bidang Pemerintahan:

1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan :

- Bahwa masih banyak warga yang belum melakukan Perekaman KTP-eL;
- Masih banyak warga yang mutasi atau pindah tidak melapor sehingga kevalidan data penduduk sulit di capai,dan tidak terdata sebagai penduduk setempat .

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selalu menyampaikan akan pentingnya hal tersebut, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan warga sudah mempunyai KK dan KTP Elektronik.

Pembinaan Perangkat memiliki Permasalahan:

- Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Aparatur Kelurahan serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
- Sistim administrasi Kependudukan dan urusan

Pemerintahan belum tercapai dengan baik sehingga perlu adanya pembenahan pada teknis data penduduk.

Upaya yang telah dilakukan:

1. Perlu pelatihan peningkatan kapasitas SDM aparatur di Kecamatan;
2. Anggaran untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi belum maksimal penganggarannya;

B. Bidang Pertanahan Dan Aset, Permasalahan:

a. Masih Banyak Kasus-kasus tumpang tindih kepemilikan tanah sehingga menimbulkan konflik.
b. Banyaknya Tanah yang masuk wilayah Tahura, Tanah milik Perusahaan, sehingga masyarakat banyak menuntut atas tanah tersebut untuk di buatkan Surat atas Tanah tersebut
c. Banyak Masyarakat yang memiliki SKPT bukan penduduk setempat sehingga bilamana ada pembuatan Surat atas tanah yang berbatasan dengan warga tersebut akan menjadi kendala dalam proses pembuatan Surat Tanah.

C. Bidang Ekonomi Pembangunan & Pemberdayaan Perempuan,

Permasalahan :

a. Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang masih belum direalisasi;
b. Minimnya sosialisasi dari Stake Holder yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
c. Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Upaya yang telah dilakukan:

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat dan lembaga - lembaga yang berada di tingkat Desa atau Kelurahan maupun kecamatan dengan stake holder atau dinas terkait dan pihak swasta yang ada diwilayah Kecamatan Samboja.

D. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan :

a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
b. Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
c. Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi diKecamatan Samboja.

Upaya yang telah dilakukan :

a. Meningkatkan peran serta Lembaga dengan Organisasi Kepemudaan di Samboja lebih maksimal agar lebih baik kedepannya.

F. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat,

Permasalahan:

a. Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
b. Masih tingginya penggunaan Miras dan Narkoba;

Rekomendasi :

1. Mengadakan rapat pembinaan Linmas dan Koordinasi satgas yang lain, untuk meningkatkan SDM agar memahami tentang hak dan kewajiban dan dapat melindungi masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan RKPD Kecamatan Samboja adalah perbandingan antara program/kegiatan yang tertuang ke dalam rancangan dengan hasil analisis kebutuhan SKPD atau adanya perubahan program kegiatan yang tidak sesuai dengan tupoksi SKPD.

Review secara rinci dapat disampaikan sebagaimana dalam Tabel 2.3/T-C 31 dibawah ini :

T-C 31

Review Terhadap Rancanga Awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

Perangkat Daerah : Kecamatan Samboja

No	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Akhir RKPD						Selisih Pagu	Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec Samboja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	18.648.482.076	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec Samboja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74	22.047.376.671	3.398.894.595	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Samboja	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	3	200.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Samboja	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	11	605.000.000	405.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Samboja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	1	50.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Samboja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	1	140.000.000	90.000.000	Sub Kegiatan Baru dan Penambahan Pagu Anggaran

							PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Kec Samboja	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	51	300.000.000	300.000.000	Sub Kegiatan Baru dan Penambahan Pagu Anggaran
							PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Kec Samboja	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kepmen 050 5889	Berita Acara	50	25.000.000	25.000.000	Sub Kegiatan Baru dan Penambahan Pagu Anggaran
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec Samboja	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	5.000.000	5.000.000	Sub Kegiatan Baru dan Penambahan Pagu Anggaran

							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec Samboja	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	2	5.000.000	5.000.000	Sub Kegiatan Baru dan Penambahan Pagu Anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Samboja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	2	150.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Samboja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	2	70.000.000	(80.000.000)	Pengurangan Pagu Anggaran
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Samboja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	2	60.000.000	60.000.000	Sub Kegiatan Baru dan Penambahan Pagu Anggaran
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Samboja	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	laporan	14	11.502.720.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Samboja	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	laporan	14	14.136.614.595	2.633.894.595	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Samboja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	98	11.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Samboja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	98	13.433.894.595	2.433.894.595	Penambahan Pagu Anggaran

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Samboja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Samboja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	25.000.000	(25.000.000,00)	Pengurangan Pagu Anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec Samboja	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	5	452.720.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec Samboja	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	5	652.720.000	200.000.000	Penambahan Pagu Anggaran
							Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	25.000.000	25.000.000	Sub Kegiatan Baru dan Penambahan Pagu Anggaran
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec Samboja	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	unit	1030	40.800.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec Samboja	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	unit	9863	265.800.000	225.000.000	

							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec Samboja	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	25.000.000	25.000.000	Penambahan Pagu Anggaran
							Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec Samboja	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	1	150.000.000	150.000.000	Penambahan Pagu Anggaran
							Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kec Samboja	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	laporan	1	50.000.000	50.000.000	Penambahan Pagu Anggaran
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec Samboja	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	6	40.800.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec Samboja	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	6	40.800.000	-	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec Samboja	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	orang	100	155.440.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec Samboja	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	orang	100	155.440.000	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec Samboja	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	120.440.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec Samboja	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	120.440.000	-	

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec Samboja	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	20	35.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec Samboja	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	20	35.000.000	-	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Samboja	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Layanan	6	1.873.121.075	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Samboja	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Layanan	6	1.973.121.075	100.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Samboja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	59	131.871.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Samboja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	59	131.871.000	-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Samboja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	11	324.605.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Samboja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	11	324.605.000	-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Samboja	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	10.457.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Samboja	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	10.457.000	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Samboja	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60	236.411.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Samboja	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	71	336.411.000	100.000.000	Penambahan Anggaransebesar 100.000.000 untuk Fasilitasi Kegiatan Rapat-Rapat

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Sambo ja	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	115.287.075	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Sam boja	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	115.287.075	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Sambo ja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	718	1.054.490.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Sam boja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	718	1.054.490.000	-	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Sambo ja	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit	53	813.973.200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Sam boja	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	unit	53	813.973.200	-	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec Sambo ja	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	170.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec Sam boja	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	170.000.000	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Sambo ja	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	53	643.973.200	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Sam boja	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	53	643.973.200	-	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Sambo ja	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12	3.759.850.001	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Sam boja	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12	3.764.850.001	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Sambo ja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	30.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Sam boja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	35.000.000	5.000.000	Perlu penambahan Pagu Anggaran Kecamatan

														sebesar 5.000.000 untuk administrasi keuangan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Samboja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.342.510.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Samboja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.342.510.000	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Samboja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.387.340.001	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Samboja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.387.340.001	-	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Samboja	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	150	302.577.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Samboja	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	150	332.577.800	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Samboja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	8	70.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Samboja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	8	50.000.000	(20.000.000,00)	Pengurangan Pagu Anggaran
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Samboja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	70	81.802.800	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Samboja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	70	81.802.800	-	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Samboja	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	11	150.775.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Samboja	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	11	200.775.000	50.000.000	penambahan anggaran Pemeliharaan gedung kantor (Kecamatan) sebesar 50.000.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec Samboja	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	75	65.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec Samboja	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	75	8.295.670.750	8.230.670.750	
			Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	Persen	100				Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	Persen	100			
2.1						-	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	2	450.000.000	450.000.000	
							Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	2	150.000.000	150.000.000	Sub Kegiatan Baru

							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	3	300.000.000	300.000.000	Sub Kegiatan Baru pindahan dari Anggaran Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (HUT RI)
2.2						-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	SPM	1	50.000.000		
							Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	1	50.000.000		Sub Kegiatan Baru pindahan dari Anggaran Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec Sambo ja	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	3	65.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec Samboja	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	150	7.795.670.750	7.730.670.750	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec Sambo ja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	60.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	1.470.670.750	1.410.670.750	Penambahan Anggaran untukFasilitasi PATEN,Pemeliharaan PJU,Penanganan Darurat

														Bencana dan Pengelolaan Sampah Kecamatan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Sambo ja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Sam boja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	97	6.325.000.000	6.320.000.000	Penambahan Pagu untuk kegiatan prioritas Musrenbang Kecamatan
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec Sambo ja	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	72,7	23.444.562.075	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec Sam boja	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	72,7	21.858.000.000	(1.586.562.075,00)	
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec Sambo ja	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	10	15.294.150.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec Sam boja	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	10	7.900.000.000	(7.394.150.000,00)	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kec Sambo ja	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	10	69.154.000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kec Sam boja	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	10	50.000.000	(19.154.000,00)	Pengurangan Pagu Anggaran Musrenbang

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Sa mbo ja	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	84	7.454.996. 000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Sam boja	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	84	4.500.000.0 00	(2.954.996 .000,00)	Pengurangan Pagu Kecamatan Rp.660.000.0 00 dan Peralihan Anggaran Kelurahan Ke Sub Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Sa mbo ja	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas /Ormas	2	7.730.000. 000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Sam boja	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/O rmas	2	3.300.000.0 00	(4.430.000 .000,00)	Anggaran 50 Jt Per RT di pindah KE SUB KEGIATAN Penyelenggara an Lembaga Kemasyarakat an
	Evaluasi Kelurahan	Kec Sa mbo ja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	3	40.000.000	Evaluasi Kelurahan	Kec Sam boja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	3	50.000.000	10.000.00 0	Penambahan Pagu Anggaran
3 . 2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec Sa mbo ja	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	12	8.150.412. 075	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec Sam boja	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	12	13.958.000. 000	5.807.587. 925	

	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Samboja	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	10	8.100.412.075	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Samboja	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	10	13.908.000.000	5.807.587.925	Penambahan Anggaran peralihan dari Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (50 Jt/RT) dan tambahan anggaran untuk Fasilitasi Lembaga
	Penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec Samboja	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	2	50.000.000	Penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec Samboja	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	2	50.000.000	-	
4							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Presentase	100	175.000.000	175.000.000	
4.1							Koordinasi Upaya Penyelenggaraan		Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan	Kegiatan		175.000.000	175.000.000	

							Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Ketenteraman dan Ketertiban Umum					
							Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	175.000.000	175.000.000	Sub Kegiatan Baru dan Penambahan Pagu Anggaran
5							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase	100	230.000.000	230.000.000	
5.1							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	11	230.000.000	230.000.000	
							Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	331	230.000.000	230.000.000	Sub Kegiatan Baru pindahan dari Anggaran Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

	JUMLAH			42.158.044.151	JUMLAH			52.606.047.421	10.448.003.270	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan masyarakat tentang program pembangunan terakomodir dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa/Kelurahan dan kecamatan setiap satu tahun sekali. Dari dokumen perencanaan yang ada, sebagian besar usulan masyarakat lebih di fokuskan kepada pembangunan fisik. Hal ini dapat dimengerti karena memang masyarakat sangat mendambakan sarana pelayanan umum yang layak, misalnya jalan , jembatan , gedung sekolah dan tempat ibadah. Usulan program dan kegiatan wilayah Kecamatan Samboja yang utamanya mengedepankan bidang infrastruktur dan umumnya dalam bidang pendidikan.

Keberhasilan pembangunan tidaklah semata - mata ditentukan oleh banyaknya kegiatan yang dilakukan atau diprogramkan. Alasan yang paling lazim untuk pernyataan tersebut adalah keterbatasan dana dan sumberdaya pedukung lainnya. Oleh karena itu perlu dalam satu perencanaan memilah kegiatan mana yang mendesak dan segera dibutuhkan masayarakat dan kegiatan mana yang dapat ditunda. Dengan kata lain dalam setiap perencanaan pembangunan perlu menyusun prioritas program kegiatan.

Prioritas program pembangunan Kecamatan Samboja Tahun 2025 mengacu pada arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang secara umum sebagai berikut:

a. Peningkatan kinerja Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
b. Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan/Mikro.
c. Peningkatan Fungsi Kecamatan bidang pembangunan skala kecil sesuai permasalahan Kecamatan.
d. Hasil Musrenbang Kecamatan di Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja di Tahun 2025,
e. Usulan pada Musrenbang Kecamatan berjumlah 834, berdasarkan skala prioritas dan lintas OPD, adapun dari jumlah tersebut di pertimbangkan dari skala prioritas kewenangan Kecamatan melalui verifikasi usulan tersisa 414 paket judul.

Namun demikian kegiatan lain yang bersifat non fisik masih mendapat apresiasi dari masyarakat, misalnya pelatihan keterampilan, bantuan usaha kecil, walaupun volumenya kecil. Selanjutnya, untuk lebih detail tentang usulan program dan kegiatan hasil Musyawarah

Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T.C 32 dibawah ini:

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah:
KECAMATAN SAMBOJA

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Kamus Usulan	Besaran/Volume	Catatan
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Gedung Posyandu Dahlia III RT.01 Tanjung Harapan	225,000,000	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembangunan Posyandu Dahlia III Jl. Wisata RT. 01 Tanjung Harapan	100,000,000	
3		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan dan pengerasan jalan di samping musholla at taqwa RT 001 Tanjung Harapan	225,000,000	
4		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan badan jalan Gang Tanjung Pude Rt.01 Tanjung Harapan	200,000,000	
5		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gg. Bubuhan Rt. 001 Kelurahan Wonotirto	165,000,000	
6		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gg Family Rt. 002 Kel. Wonotirto	150,000,000	
7		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap (Longsoran Depan Randon) Rt. 002 Kel. Wonotirto	200,000,000	
8		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Parit Pasangan Gg Sudian Rt. 002 Kel. Wonotirto	225,000,000	
9		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jalan Gg Bpp Rt. 002 Kel. Wonotirto	225,000,000	
10		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jalan Samping Mushola Rt.01 Sanipah	150,000,000	
11		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Warga GG Pelangi Rt.06 Sanipah	150,000,000	
12		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Badan Jalan Petani Sariwangi Rt.08 Sanipah	200,000,000	

13		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pasar Malam Rt.17 Sanipah	200,000,000	
14		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit/Drainage Rt.04 Sanipah	200,000,000	
15		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit/Pembuangan Drainage Gang Ramli Rt.04 Sanipah	200,000,000	
16		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normaslisasi Parit Gang Gunung Pasir RT.05 Sanipah	150,000,000	
17		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan Jalan Gang AEP RT 01 Kel.Sungai Seluang	225,000,000	
18		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pagar Kuburan Muslim Rt.02 Sungai Seluang	225,000,000	
19		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan Jalan Menuju Kuburan Rt.02 Sungai Seluang	225,000,000	
20		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semenisasi Jalan Kuburan RT 03 Kel.Sungai Seluang	225,000,000	
21		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Paret Jalan Pelajar/Said Usman SDN 008 Sungai Seluang	225,000,000	
22		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Jalan Posyandu RT 05 Kel.Sungai Seluang	225,000,000	
23		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Parit RT 07 Sungai seluang	225,000,000	
24		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gang Cimanggu Dalam RT 08 Kel.Sungai Seluang	225,000,000	
25		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan Gang Rohani	200,000,000	
26		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gang Sulaiman RT 10 Kel.Sungai Seluang	200,000,000	
27		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pondasi Parit RT 10 Kel.Sungai Seluang	225,000,000	
28		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Turap Parit RT 12 Kel.Sungai Seluang	225,000,000	
29		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasasi Parit RT 12 Kel.Sungai Seluang	200,000,000	
30		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Pengerasan Jalan Gang Pasah RT 12 Kel.Sungai Seluang	200,000,000	

			Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
31		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Jalan Gang Beringin RT 13 Kel.Sungai Seluang	200,000,000	
32		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Posyandu Mawar Merah 5 Sungai Seluang	200,000,000	
33		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan turap parit RT 13 Sungai Seluang	200,000,000	
34		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelebaran Paret Kampung Baru Kelurahan Sungai Seluang	200,000,000	
35		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gang.Djura RT.016 Sungai Seluang	225,000,000	
36		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Parit pasangan batu RT 016 Sungai Seluang	225,000,000	
37		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Rt 001 Beringin Agung	200,000,000	
38		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Rt 002 Beringin Agung	200,000,000	
39		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Parit Besar Rt 003 Beringin Agung	225,000,000	
40		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Turap Jalan Rt 004 BeringinAgung	150,000,000	
41		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Semenisasi Jalan Rt 005 Beringhin Agung	200,000,000	
42		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Rt 006 beringin Agung	150,000,000	
43		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Rt 007 Beringin Agung	150,000,000	
44		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Rt 008 Beringin Agung	150,000,000	
45		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Turap Jalan Rt 009 Beringin Agung	225,000,000	
46		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Rt 010 Beringin Agung	225,000,000	
47		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan pembuatan Drainase Rt.01 Kampung Lama	150,000,000	

48		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan badan gang semenisasi Rt.02 Kampung Lama	200,000,000	
49		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan parit- patit, kiri dan kanan Rt.03 Kampung Lama	200,000,000	
50		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan jalan gang Datuk Ajid Rt.04 Kampung Lama	200,000,000	
51		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi lanjutan gang Tk Rt.05 Kampung Lama	200,000,000	
52		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit RT. 006 Kelurahan Kampung Lam a	225,000,000	
53		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan badan jalan gang Gotong Royong Rt.07 Kampung Lama	200,000,000	
54		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Jembatan Nelayan Rt.01 Handil Baru	150,000,000	
55		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Manual Rt.02 Handil Baru	100,000,000	
56		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan pengerjaan pengerasan badan jalan Rt.08 Handil Baru	225,000,000	
57		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan pengerjaan pengerasan badan jalan Rt.09 Handil Baru	150,000,000	
58		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Turap Rt.11 Handil Baru	200,000,000	
59		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jalan Rt.13 Handil Baru	100,000,000	
60		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penimbunan lapangan Sepak Bola Desa Karya Jaya Agung	225,000,000	
61		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Dermaga RT. 006 Kuala Samboja	200,000,000	
62		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit dan Penutup RT. 008 Kuala Samboja	200,000,000	
63		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan RT. 012 Kuala Samboja	100,000,000	
64		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit RT. 012 Kuala Samboja	150,000,000	
65		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Rehab Parit Pasangan Batu Jl Desa karya jaya	225,000,000	

			Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
66		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan Jalan Gg. Tenggiri Jl. Nelayan RT. 01 Tanjung Harapan	225,000,000	
67		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi parit RT 001 Tanjung Harapan	225,000,000	
68		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap Lanjutan Perbatasan RT. 02 dan RT. 01 Tanjung Harapan	225,000,000	
69		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap Batu Parit Gang Insani RT. 02 Tanjung Harapan	225,000,000	
70		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Habib Masyir RT.03 Tanjung Harapan	150,000,000	
71		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap Batu Parit Sandam Jl. Gang Kedondong RT 04 Tanjung Harapan	225,000,000	
72		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Gang Pun Pun RT.04 Tanjung Harapan	225,000,000	
73		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan paving halaman musholla musholihul muslimin RT 005 Tanjung Harapan	150,000,000	
74		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Gang Kenangan RT 011 Tanjung Harapan	225,000,000	
75		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Beton Cor Jalan Usaha Tani Rt. 003 Kel. Wonotirto	225,000,000	
76		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit Pinggir Jalan Raya Balikpapan - Handil 2 Rt. 003 Kel. Wonotirto	200,000,000	
77		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap Pasangan Batu Dan Semenisasi Halaman Mushola Janatul Firdaus Rt. 004 Kel. Wonotirto	200,000,000	
78		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pasang Batu [Belakang Musholla Anur] Rt. 005 Kel. Wonotirto	150,000,000	
79		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Batu Parit Dekat Rumah Bapak Selamet Mujiono Rt. 006 Kelurahan Wonotirto	200,000,000	
80		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Badan Jalan Samping Mesjid Al Mutaqim Rt. 006 Kel. Wonotirto	200,000,000	
81		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Canopy Teras Posyandu Anggrek Bulan Rt. 007 Kelurahan Wonotirto	100,000,000	
82		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit Kanan Kiri Jalan Karya Rt 008 (Galian Biasa, Tanah	200,000,000	

				Lumpur Manual) Kelurahan Wonotirto		
83		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Turap Dan Badan Jalan Siabdullah Rt. 008 Kel. Wonotirto (Pasangan Batu Gunung , Timbunan Tanah Pilihan Dan Perkerasan Latrit)	225,000,000	
84		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi parit Gapoktan Mekar Jaya Kel. Wonotirto	225,000,000	
85		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan WC Posyandu Ab 2 & 3 Kel. Wonotirto	150,000,000	
86		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Paving Blok di Kuburan Rt.12 Sanipah	150,000,000	
87		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Badan Jalan Gang Ponde Rt.04 Sanipah	200,000,000	
88		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semenisasi Gang Riduan Rt.05 Sanipah	150,000,000	
89		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan GG Pelangi Rt.06 Sanipah	200,000,000	
90		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pagar Sekolah TK Kenanga Rt.06 Sanipah	200,000,000	
91		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Rt.07 Sanipah	225,000,000	
92		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan paving halaman MI Al Jihad RT.9 Kuala Samboja	225,000,000	
93		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jalan Samping Taman Kuala Samboja RT. 014	130,000,000	
94		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Langgar Ar-Raudah RT. 018 Kuala Samboja	100,000,000	
95		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Canopy Kelurahan Kuala Samboja	94,996,000	
96		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gapura Kampung KB	55,000,000	
97		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Turap Parit Pos Pantai Wisata Jl. Wisata RT. 01	200,000,000	
98		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gg.Trakulu Jl. Nelayan RT. 01	200,000,000	

99		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Tiang Listrik Gg. Tanjung Pude Jl. Nelayan RT. 01	300,000,000	
100		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Jl. Nelayan RT. 01	250,000,000	
101		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Samping Rumah Mang M Yasin Dan Parno Jl. Nelayan RT. 01	200,000,000	
102		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemagaran Fasilitas Umum Jl. Wisata RT. 01	300,000,000	
103		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Turap Perbatasan RT. 01 dan RT.02 Jalan Pasiran	200,000,000	
104		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan jembatan Gang Tanjung Pude	200,000,000	
105		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan jalan Gang Pak Saepullah	200,000,000	
106		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan jalan Gang samping kost-kost an Pak Nana / Gang Ki Sa'an	150,000,000	
107		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gang Kakap	200,000,000	
108		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Samping Rumah Pak Tolani Jl. Nelayan RT. 01	200,000,000	
109		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Turap Paret arah Rumah Pak Nana	200,000,000	
110		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Tenda ukuran 6 x 12 dan perlengkapannya	200,000,000	
111		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penimbunan Lapangan Sepak Bola	300,000,000	
112		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gapura Perbatasan RT.01	200,000,000	
113		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Turap Batu Gg. Semangat RT. 02	65,000,000	
114		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap Batu Paret Belakang Rumah Sadio Gang Semangat RT. 02	300,000,000	
115		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan Gang H. Slamet RT. 02	200,000,000	
116		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Peningkatan Badan Jalan Gang Insani RT. 02	200,000,000	

			Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
117		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Jl. Pasiran Gang Insani RT.2	200,000,000	
118		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase depan SDN 018 Jl.Wisata RT.02	200,000,000	
119		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Badan Jalan Gang Insani RT.02 menuju RT.03	200,000,000	
120		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan 3 (tiga) Gorong-Gorong Gang Semangat	200,000,000	
121		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap Batu Paret Belakang SDN 018 RT. 02	300,000,000	
122		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan Gang Topatudin RT. 02	1,000,000,000	
123		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap Batu Paret Belakang Rumah Amirudin RT. 02	200,000,000	
124		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan penurapan belakang Pak Prawoto	200,000,000	
125		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Drainase Jalan M.Jaeni	200,000,000	
126		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Manual Jalan M.Jaeni	300,000,000	
127		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Turap Batu Jalan Kedondong RT. 04	75,000,000	
128		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap Batu Parit Kuswan Jl. Gang Kedondong RT 04	300,000,000	
129		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap batu parit jalan wisata rt.4	300,000,000	
130		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Bedah Rumah Jl.Pasiran RT.04	200,000,000	
131		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jalan Gang Pun Pun RT.04	200,000,000	
132		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Tapiang RT.04	200,000,000	
133		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Ulin, 2 Unit Jl. Sungai Serayu RT. 05	100,000,000	

134		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Selokan Pembuangan Air Limbah Gang Flamboyan RT. 05	200,000,000	
135		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan semenisasi Gang Rambutan Jl. Pasiran RT 005	200,000,000	
136		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan parit pasangan batu gang Rambutan RT 005	200,000,000	
137		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemagaran pengaman tepi sungai serayu RT 005	200,000,000	
138		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Atap dan Gudang LPM Tanjung Harapan	100,000,000	
139		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan Badan Jalan dan Gorong- gorong Jl. Wisata Gg. Satria RT. 06	200,000,000	
140		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Dari Gg. TK s/d Depan Rumah Pak Poniman Jl. Wisata RT. 06	200,000,000	
141		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan Jl. Kedondong Gg. Buntu RT. 06	200,000,000	
142		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penambahan Tinggi Turap Sungai Irian dari Pintu Air hingga Pintu Air	200,000,000	
143		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit Gang Satria	200,000,000	
144		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Kayu Sungai Irian	150,000,000	
145		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Turap Batu Madrasah	200,000,000	
146		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase RT.06	250,000,000	
147		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gorong-Gorong RT.06	150,000,000	
148		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pemagaran dan Pintu Kuburan Muslimin Anak- anak Jl. Pasiran RT. 07	85,000,000	
149		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Turap Batu Parit Jl. Pasiran Gang Irian RT. 07	500,000,000	
150		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan Gang Udin RT. 07	300,000,000	
151		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Peningkatan Badan Jalan Gang Encur RT. 07	200,000,000	

			Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
152		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Normalisasi Parit RT.07	200,000,000	
153		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pelebaran Jalan Handil Wajar Gang Musholla RT. 08	50,000,000	
154		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Gang Saprudin Jl. Handil Wajar RT. 08	200,000,000	
155		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit Kebun Handil Wajar RT. 08	250,000,000	
156		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Gang Gojali Jl. Handil Wajar RT. 08	100,000,000	
157		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan Gang Jasiman Jl.Handil Wajar RT.08	250,000,000	
158		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan Gang Tawirja Jl.Handil Wajar RT.08	200,000,000	
159		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Penurapan Gang Mingun dan Pengurukan	50,000,000	
160		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gorong-Gorong Perbatasan Dengan Kampung Lama RT.9	250,000,000	
161		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Gang Rambe Jl. Handil bangun RT 009	200,000,000	
162		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Badan Jalan gang Rambe 2 Jl. Handil Bangun RT 009	200,000,000	
163		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semenisasi Gang Sedulur	200,000,000	
164		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Gang Permai	200,000,000	
165		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Gang Rambe 2 RT. 09	200,000,000	
166		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gang Mingun RT.09	200,000,000	
167		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi RT.09	200,000,000	
168		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Turap RT.09	200,000,000	

169		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Turap Gang Isro RT.09	200,000,000	
170		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Turap Parit RT.10	50,000,000	
171		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan badan jalan gang Reog RT 010	200,000,000	
172		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap Parit Jalan Perbatasan RT.10 dengan RT.9	200,000,000	
173		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembuatan Pagar Musholla Qiyamuddin RT.10	200,000,000	
174		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemasangan Paping halaman Langgar RT.10	100,000,000	
175		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Turap Batu RT.11	50,000,000	
176		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan jalan Gg. Melati Jl. Handil Bangun RT. 011	200,000,000	
177		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan jalan Gg. Mulia Jl. Handil Bangun RT. 011	200,000,000	
178		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan semenisasi jalan Handil Bangun RT 011	200,000,000	
179		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan jembatan gang Keluarga RT 011	100,000,000	
180		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi manual parit gang pandan sari RT 011	200,000,000	
181		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gang Pandan Sari RT.11	200,000,000	
182		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Paret Gang Pandan Sari RT.11	200,000,000	
183		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Gang Mawar RT 011	100,000,000	
184		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Gang Mulia RT.11	200,000,000	
185		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gafura Pinggir Jalan Umum Masuk Kantor Lurah Wonotirto	200,000,000	
186		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Rehab Berat Parkiran Motor Depan Kuburan	75,000,000	

			Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muslim Rt. 001 Kelurahan Wonotirto		
187		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jembatan Jalan Masuk Kuburan Muslim Rt. 001 Kelurahan Wonotirto	100,000,000	
188		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan (Depan Sumur Umum) Rt. 002 Kel. Wonotirto	90,000,000	
189		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Mushola Baituraohim Rt. 002 Kel. Wonotirto	90,000,000	
190		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap Tk Negri 1 Rt. 002 Kel. Wonotirto	200,000,000	
191		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Surya Tani A + Urukan Rt. 002 Kel. Wonotirto	200,000,000	
192		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Surya Tani A Rt. 002 Kel. Wonotirto	200,000,000	
193		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Parit Pasangan Gg Ramania Rt. 002 Kel. Wonotirto	200,000,000	
194		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gg Kwanyi Rt. 002 Kel. Wonotirto	200,000,000	
195		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gapura Beserta Papan Nama Yayasan Dan Papan Nama Sekolah Mi Al Ishlah Rt. 003 Kel. Wonotirto	100,000,000	
196		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Normalisasi Parit Rawa Guna Rt. 003 Kel. Wonotirto	200,000,000	
197		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Normalisasi Parit Rawa Sari Rt. 003 Kel. Wonotirto	200,000,000	
198		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Jalan Usaha Tani Rt. 003 Kel. Wonotirto	100,000,000	
199		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Badan Jalan Usaha Tani Rt. 003 Kel. Wonotirto	100,000,000	
200		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembuatan Parit Pasangan Di Gg. Rohani Rt. 003 Kel. Wonotirto	250,000,000	
201		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Gorong-Gorong Gg. Famili Rt. 003 Kel. Wonotirto	200,000,000	
202		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gapura Gg. Rohani Rt. 003 Kel. Wonotirto	100,000,000	

203		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gapura Gg. Famili Rt. 003 Kel. Wonotirto	100,000,000	
204		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gapura Jalan Wonotirto - Tanjung Harapan Rt. 003 Kel. Wonotirto	150,000,000	
205		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Gang Karya Tani Rt. 004 Kel. Wonotirto	150,000,000	
206		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sambungan Drainase Pak Mulko Rt. 004 Kel. Wonotirto	150,000,000	
207		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jln Karya Raga Rt. 004 Kel. Wonotirto	200,000,000	
208		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pembuangan Bpk Sujono Rt. 004 Kel. Wonotirto	200,000,000	
209		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit Pembuanganbu Suyatmi Rt. 004 Kel. Wonotirto	150,000,000	
210		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Halaman Gereja Rt. 004 Kel. Wonotirto	50,000,000	
211		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap Pasangan Batu Sungai Tirtosari Rt. 004 Kel. Wonotirto	200,000,000	
212		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sambungan Drainase Depan Bpk Sapon Rt. 004 Kel. Wonotirto	75,000,000	
213		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pasang Batu [Parit Samping Rumah Bpk. Maryatin] Rt. 005 Kel. Wonotirto	100,000,000	
214		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pasang Batu [Parit Samping Rumah Bpk. Agus Sunaryo] Rt. 005 Kel. Wonotirto	100,000,000	
215		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pasang Batu [Parit Samping Rumah Bpk. Nurdin] Rt. 005 Kel. Wonotirto	250,000,000	
216		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pasang Batu [Parit Samping Rumah Bpk. Pikolin] Rt. 005 Kel. Wonotirto	250,000,000	
217		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pasang Batu [Parit Samping Rumah Bpk. Suparman] Rt. 005 Kel. Wonotirto	250,000,000	
218		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pasang Batu [Parit Samping Rumah Bpk. Sarmin] Rt. 005 Kel. Wonotirto	100,000,000	
219		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Lapangan Bola Rt. 005 Kel. Wonotirto	150,000,000	

220		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit Tirtasari Rt. 005 Kel. Wonotirto	100,000,000	
221		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Jalan Usaha Tani (Samping Kanan Rumah Bpk Lukman Sampai Parit Saluran Tirtasari) Rt. 005 Kel. Wonotirto	100,000,000	
222		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Parit Pasang Batu [Parit Samping Rumah Bpk. Parlan] Rt. 005 Kel. Wonotirto	150,000,000	
223		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Kanopi Posyandu Rt. 005 Kel. Wonotirto	50,000,000	
224		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pasang Batu (Parit Samping Barat Lapangan Bola) Rt. 005 Kel. Wonotirto	100,000,000	
225		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semenisasi Gang Ilham Rt. 006 Kelurahan Wonotirto	200,000,000	
226		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit Belakang Rumah Bapak Giman Rt. 006 Kelurahan Wonotirto	200,000,000	
227		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jembatan Masuk Gang Ilham Rt. 006 Kelurahan Wonotirto	150,000,000	
228		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembuatan Turap Pasar Subuh Rt. 008 Kel. Wonotirto (Pas Batu Gunung , Cerucuk Ulin)	145,000,000	
229		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pasangan Batu Belakang Rumah Bapak Imam Rt. 008 Kel. Wonotirto (Pas Batu Gunung , Cerucuk Ulin)	95,000,000	
230		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Gang Barokah Rt. 008 Kel. Wonotirto (Perkerasan / Semenisasi)	140,000,000	
231		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Parit Pasangan Batu Di Samping Rumah Bapak Masruchin Rt. 008 Kel. Wonotirto (Pas Batu Gunung , Cerucuk Ulin)	75,000,000	
232		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Turap Dan Parit Jalan Samping Rumah Bapak Sodikin Rt. 008 Kel. Wonotirto (Pas Batu Gunung , Cerucuk Ulin)	95,000,000	
233		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Depan Rumah Bapak Imam Menuju Rumah Bapak Agim Rt. 008 Kel. Wonotirto	180,000,000	
234		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Semenisasi Dari Simpangan Ma Nuruddin Menuju Rumah Bapak	80,000,000	

				Agim Rt. 008 Kel. Wonotirto		
235		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Badan Jalan Gang Prayit Rt. 003 Kel. Wonotirto	200,000,000	
236		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gang Famili 2 Rt. 003 Kel. Wonotirto	200,000,000	
237		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Turap Gang Rambutan Rt. 002 Kel. Wonotirto	200,000,000	
238		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pengaspalan Jalan Masuk RT. 03	100,000,000	
239		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penimbunan Badan Jalan GG Mawar	100,000,000	
240		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semenisasi Gang Mawar	100,000,000	
241		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Perawatan Parit Induk Pinggir Jalan Raya	32,500,000	
242		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pagar Pembatas RT	84,000,000	
243		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Perawatan Parit Kecil	35,000,000	
244		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Baru	45,000,000	
245		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembentukan Badan Jalan Gang Nurali	150,000,000	
246		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit/Pembuangan Drainage Gang Ramli	150,000,000	
247		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jembatan Nelayan Gang Service	200,000,000	
248		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit/Pembuangan Drainage Gang Ponde	100,000,000	
249		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jalan Gang Ponde	150,000,000	
250		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit/Pembuangan Drainage Belakang SMU Islam	200,000,000	
251		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semenisasi Jalan Gang Anddi Ridwan	150,000,000	

252		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jalan Gang Hatta	300,000,000	
253		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembentukan Badan Jalan Gang Hatta	300,000,000	
254		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit/Pembuangan Drainage Gang Hatta	500,000,000	
255		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semenisasi Jalan Gang Maperappi	300,000,000	
256		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit/Pembuangan Drainage Gang Maperappi	150,000,000	
257		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Perbaikan Pintu Air dan Parit Area Belakang EX Puskesmas	150,000,000	
258		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembentukan Badan Jalan GG Saddang	150,000,000	
259		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semenisasi Jalan GG Saddang	150,000,000	
260		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit/Pembuangan Drainage GG Saddang	150,000,000	
261		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit/Pembuangan Drainage Gang Maperappi	150,000,000	
262		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Baru Gang Buraira	30,000,000	
263		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pagar Kuburan Kristen	120,000,000	
264		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembuatan Pagar Kuburan Muslim	200,000,000	
265		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semenisasi Jalan Bank Sampah	150,000,000	
266		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gapura Simpang Jalan Sariwangi	100,000,000	
267		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Prit Baru Jalan Sariwangi Kiri Kanan	200,000,000	
268		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Parit Gang Gunung Pasir	200,000,000	
269		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Lanjutan Parit Gang Spontan	200,000,000	

			Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
270		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penambahan Lebar Badan Jalan Sariwangi Depan Kuburan Kristen dan Musliin untuk Lahan Parkir	150,000,000	
271		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Parit GG Pelangi	150,000,000	
272		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semeniasi GG Judding	150,000,000	
273		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semeniasi GG Pelangi	150,000,000	
274		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Turap Belakang Rumah Warga	200,000,000	
275		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semenisasi GG Nurusalam	200,000,000	
276		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Parit/Pengeras	190,000,000	
277		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gang Amanah	175,000,000	
278		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penimbunan Gang Anggrek	180,000,000	
279		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Parit	200,000,000	
280		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit dari Kuburan ke Sungai	200,000,000	
281		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Kayu arah kepantai	300,000,000	
282		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Renovasi Jembatan Nelayan	100,000,000	
283		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi GG Nelayan	100,000,000	
284		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembuatan Jembatan ke pemakaman	100,000,000	
285		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pos Kamling	50,000,000	
286		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Normaliasi Parit Warga	250,000,000	

			Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
287		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit	60,000,000	
288		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Perbaikan Parit	30,000,000	
289		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gapura Gang Harapan 1	40,000,000	
290		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Gapura Gang Harapan 2	40,000,000	
291		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gang Nurdin	200,000,000	
292		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Warga	200,000,000	
293		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Parit Warga	200,000,000	
294		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gang Family	200,000,000	
295		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Badan Jalan Gang Saudara	200,000,000	
296		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semenisasi Halaman Pasar Malam	150,000,000	
297		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Pasar Malam	50,000,000	
298		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Halaman Panggung Pasar Malam	50,000,000	
299		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Depan Puskesmas Handil Baru	100,000,000	
300		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelebaran Jembatan Jalan SMP 4	100,000,000	
301		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Belakang Hj. Turipah	65,000,000	
302		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Belakang Abd. Samad	65,000,000	
303		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semenisasi Gang Petapaki	100,000,000	

304		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan Jalan GG Bu UUS	100,000,000	
305		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Badan Jalan GG Bu UUS tembus jalan poros kampung kamal	150,000,000	
306		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Jalan Poros Balikpapan Handil II	400,000,000	
307		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Parit Tembus Rumah Ibu Kamalia	100,000,000	
308		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semenisasi GG TPA	200,000,000	
309		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Depan Rumah P'Yaman	150,000,000	
310		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan BADan Jalan (Latrit) GG Keluarga	200,000,000	
311		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Jembatan Utama menuju kebun Jalan Handil Wajo	200,000,000	
312		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Parit Handil Wajo	90,000,000	
313		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Total Jembatan Nelayan	200,000,000	
314		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semenisasi GG Handil Wajo	115,000,000	
315		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Pos Ronda	50,000,000	
316		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Turap Beton Jalan Handil Wajo	135,000,000	
317		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Jalan GG Handil Wajo	120,000,000	
318		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi Sungai GG Handil Wajo	150,000,000	
319		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Jalan GG Darussalam	150,000,000	
320		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Pembangunan Dermaga Nelayan	120,000,000	
321		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Pembangunan Dermaga Nelayan	70,000,000	

			Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
322		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Jalan (Tanah Timbunan) GG Sakinah	50,000,000	
323		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Gang AEP RT 01 Kel.Sungai Seluang		
324		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Turap Parit kanan Kiri jalan Gang AEP RT 01		
325		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasasi Parit RT 01		
326		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Gang Mad Isa RT 01 Kel.Sungai Seluang		
327		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan Gang Hamzah RT 01 Kel.Sungai Seluang		
328		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Jalan Gang Saludin RT 01 Kel.Sungai Seluang		
329		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan badan jalan Gang Majeni RT 01 Kel.Sungai Seluang		
330		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan badan jalan Gang Aas Husaini RT 01 Kel.Sungai Seluang		
331		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Kelompok Tani RT 03 Kel.Sungai Seluang		
332		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelebaran Parit Kanan Kiri Jalan		
333		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pasangan Batu Kiri-Kanan Jalan Lampe RT 03 Kel.Sungai Seluang		
334		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Gang Rahmat RT 03 Kel.Sungai Seluang		
335		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi Jalan Pepaya		
336		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rehab Tangga makam Pahlawan		
337		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gorong gorong Makam Pahlawan		
338		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Taman TMP RT.004		

339		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penurapan Jalan Kampung Jawa RT 05 Kel.Sungai Seluang		
340		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pasangan RT 06 Kel.Sungai Seluang		
341		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gang Bubuhan		
342		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gang Julak		
343		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Perumahan Pinus RT 08 Kel.Sungai Seluang		
344		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pasangan Batu Perumahan Pinus RT 08 Kel.Sungai Seluang		
345		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Poskamling RT 08 Kel.Sungai Seluang		
346		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gang Juned RT 08 Kel.Sungai Seluang		
347		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gang Emang RT 08 Kel.Sungai Seluang		
348		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Turap Parit Gang Sukimin RT 08 Kel.Sungai Seluang		
349		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pasangan Batu Gang Rohana RT 08 Kel.Sungai Seluang		
350		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Gang Rohani		
351		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan parit pembuangan air		
352		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	PeningkatanJalan MI		
353		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan gorong gorong jl gang rohani		
354		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pasangan Batu RT 10 Kel.Sungai Seluang		
355		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semenisasi Jalan Asrama RT 11 Kel.Sungai Seluang		
356		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Pembuatan Parit Pasangan Batu RT 11 Kel.Sungai Seluang		

			Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
357		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pasangan Batu dan bak kontrol Jalan Said Usman RT 11 Kel.Sungai Seluang		
358		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pasangan Batu Kiri-Kanan Jalan Asrama RT 11 Kel.Sungai Seluang		
359		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Parit Pasangan Batu Gang Aman RT 11 Kel.Sungai Seluang		
360		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jembatan RT 11		
361		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Jalan Gang Beringin RT 12 Kel.Sungai Seluang		
362		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Jalan Gang Pasah RT 12 Kel.Sungai Seluang		
363		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengerasan Jalan Poskamling RT 13 Kel.Sungai Seluang		
364		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan Gang Bakri 2		
365		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Peningkatan Jalan Gang kampung Baru		
366		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi jalan gang Jamal		
367		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Jalan Poros Rt 001	60,000,000	
368		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Parit Besar Rt 002	250,000,000	
369		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Rt 003	75,000,000	
370		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Rt 004	85,000,000	
371		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Rt 005	85,000,000	
372		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Drainase Rt 006	200,000,000	
373		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Peningkatan Semenisasi Jalan Rt 007	80,000,000	

			Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
374		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Semenisasi Jalan Rt 008	150,000,000	
375		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Drainase Rt 009	90,000,000	
376		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Drainase Parit Besar Rt 010	250,000,000	
377		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan badan Gang Sejahtera.		
378		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Seminsasi kanan jl Hnadil bangun.		
379		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan gapura Jl. Handil bangun.		
380		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan semenisasi dan pengrasan badan jalan Gang Setia Budi		
381		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengrasan dan pembutan jembatan Gang Fatonah.		
382		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan Semenisasi Gang Sahabat.		
383		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan semenisasi jalan Datuk Ajid		
384		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan pembuatan parit Jalan Kampung Lama		
385		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan dermaga perahu Kampung Lama		
386		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi gang Bersama		
387		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi lanjutan gang Beriman		
388		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Turap gang Amanah Beriman		
389		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan semenisasi gang Raja		
390		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan parit samping gang gerbang Raja		

391		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi parit Jerangin		
392		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan penegrasan jalan gang Bahalang		
393		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan dan pengerasan jalan belakang Kecamatan		
394		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gapura gang Beriman		
395		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan semenisasi gang Amanah		
396		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Parit gang Amanah		
397		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Poskamling		
398		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi jalan SDN 037		
399		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan parit belakang SDN 037		
400		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi gang Bubuhan		
401		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Jalan RT. 006 Kelurahan Kampung Lama		
402		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan badan jalan gang Gotong Royong VI		
403		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan badan jalan gang Karet		
404		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan badan jalan Gotong Royong V		
405		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi jalan gang Gotong Gang III Royong V		
406		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan parit RT. 08		
407		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Perbaikan parit rusak akan di rehab		
408		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Pembuatan parit RT.08		

			Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
409		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Semenisasi gang Plores		
410		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Perbaikan Pos Kamling		
411		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semenisasi RT. 08		
412		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Normalisasi	30,000,000	
413		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Perawatan Jalan(Diaspal)	50,000,000	
414		Kec Samboja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembuatan Jalan	250,000,000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Samboja Tahun Anggaran 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Samboja dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut

a) Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan

pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

b) Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana secara teknokratis prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, dimana kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan : *Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.*

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Samboja yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD Kecamatan Samboja Tahun 2021-2026.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelummnya Kecamatan Samboja mempunyai Visi yaitu : *Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Samboja Yang Sejahtera "* dan Misi yaitu " *Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Bersih , Efektif,Efesien dan Melayani* " tujuan yaitu Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan

publik yang prima dan kondusifitas daerah. Meningkatkan sarana infrastruktur sebagai akses masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan partisipasi masyarakat / perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang Kecamatan meningkatkan kelancaran proses administrasi kependudukan dan meningkatkan keamanan lingkungan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu "*Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan*", yang artinya meningkatnya tertib administrasi pemerintah dan kualitas pelayanan publik dan meningkatnya Interkoneksitas antar wilayah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Samboja merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (PD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Samboja sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; dan Pembinaan pelayanan umum.

Penetapan Program dan kegiatan disamping menyesuaikan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang tingkat urgensinya tinggi terutama permasalahan Bidang Sarana dan Prasarana adalah penanggulangan banjir, sampah dan perbaikan sarana gang, serta jembatan sedangkan bidang sosial budaya adalah perbaikan RKB dan Peningkatan Sarana Posyandu memalui kegiatan PKK di wilayah Kecamatan Samboja.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dan uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

  Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Samboja diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2021-2026. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Samboja merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati.

- Pemberantasan Kemiskinan

  Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius.

  Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Demikian pula halnya dengan penanggunglan kemiskinan di Kecamatan Samboja. Program dan kegitan yang dirancang pada tahun anggaran 2025 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

  Pemberantasan kemisikinan pun menjadi salah satu indikator pencapaian kinerja didalam perjanjian kinerja antara Camat kepada Bupati, dimana terdapat 2(dua) indikator yaitu yang pertama membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah. Yang kedua melakukan pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Samboja.

- Pencapaian SPM

  Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara

akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Samboja diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

  Kecamatan Samboja sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki berbagai potensi ekonomi yang memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara. Potensi itu terutama terkait dengan bidang perkebunan kelapa sawit, dimana di Kecamatan Samboja terdapat beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta yang cukup besar dan juga Tambang Batu Bara, Perikanan yang ada di desa/Kelurahan diwilayah Kecamatan Samboja dan ada juga sarang burung walet yang bisa dikatakan

cukup banyak.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Samboja melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b) Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

- Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

  Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Samboja Tahun 2025 adalah 5 Program dengan 15 Kegiatan yang terdiri dari 44 sub kegiatan.

- Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

  Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Samboja sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Samboja dan melingkupi 3 Desa dan 10 Kelurahan.

- Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.

Adapun secara detail akan kami sajikan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 pada tabel 4.1 /T.C 33 dibawah ini :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN SAMBOJAKAB. KUTAI KARTANEGARA

TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	8	9	10	15	16
						Kecamatan Samboja				36.310.818.421			58.487.846.000
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				36.310.818.421			58.487.846.000
	7	01				KECAMATAN				36.310.818.421			58.487.846.000
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 Nilai	74 Nilai	20.012.147.671		74 Nilai	27.577.000.000
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	7 Dokumen	605.000.000		-	220.000.000
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	140.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		120.000.000
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	5.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		-
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2 Dokumen	5.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		-
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan	70.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100.000.000
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan	60.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		-

	7	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah							
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		51 Data	300.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		-
	7	01	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		50 Berita Acara	25.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		-
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabe	-	14 Laporan	14.136.614.595		-	20.930.000.000
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1148 Orang/bulan	13.433.894.595	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa		20.000.000.000
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	25.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		100.000.000
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5 Laporan	652.720.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa		800.000.000
	7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	25.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		30.000.000

	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-	1030 Unit 6 Dokumen	265.800.000		-	242.000.000
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	25.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		30.000.000
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		157.000.000
	7	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Laporan	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		-
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Laporan	40.800.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		55.000.000

	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	-	20 Orang	106.730.000		-	290.000.000
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	71.730.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		90.000.000
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		20 Orang	35.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		200.000.000
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	6 Layanan	776.393.075		-	1.010.000.000
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	15.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		30.000.000
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		140.000.000
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3 Paket	10.457.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		100.000.000
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		20 Paket	165.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		200.000.000
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		5 Paket	88.236.075	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		90.000.000
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		231 Laporan	397.700.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		450.000.000
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	-	31 Unit 96 Persen	270.000.000		-	500.000.000
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit	170.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		200.000.000
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		20 Unit	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		300.000.000

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-	12 Bulan	3.694.610.001		-	4.015.000.000
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	12.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		15.000.000
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	1.342.510.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa		1.600.000.000
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	2.340.100.001	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa		2.400.000.000
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	40 Unit 150 Unit	157.000.000		-	370.000.000
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6 Unit	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		120.000.000
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		15 Unit	15.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		50.000.000
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	92.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		200.000.000
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	8.265.670.750		-	20.730.000.000
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	420.000.000		-	475.000.000
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							

							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		2 Laporan	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		175.000.000
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 Dokumen	270.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		300.000.000
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	50.000.000		-	55.000.000
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa		55.000.000
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	-	150 Kegiatan	7.795.670.750		-	20.200.000.000
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan							

							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		15 Laporan	1.470.670.750	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa		200.000.000
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		29 Laporan	6.325.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa		20.000.000.000
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	72,7 Persen	72,7 Persen	7.728.000.000		72,7 Persen	9.780.846.000
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	-	23 Kegiatan	370.000.000		-	1.480.846.000
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		50 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa		80.846.000
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa		1.000.000.000
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		7 Pokmas / Ormas	300.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa		350.000.000
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan							

							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		2 Laporan	20.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		50.000.000
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	-	41 Kali	7.358.000.000		-	8.300.000.000
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		41 Lembaga Kemasyarakatan	7.308.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		8.000.000.000
	7	01	03	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan		2 Unit	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa		300.000.000
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	175.000.000		-	200.000.000

	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	175.000.000		-	200.000.000
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		4 Laporan	175.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa		200.000.000
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	130.000.000		-	200.000.000
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	130.000.000		-	200.000.000
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		100 Orang	130.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa		200.000.000
						Kelurahan Handil Baru Darat				1.558.060.500			2.135.000.000

	7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.558.060.500			2.135.000.000
	7	01				KECAMATAN				1.558.060.500			2.135.000.000
6	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	198.060.500		-	260.000.000
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	133.183.000		-	157.500.000
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		15 Paket	10.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat		12.000.000
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	25.002.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat		30.000.000
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	22.253.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja,		30.000.000

											Handil Baru Darat		
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1.728.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat		5.500.000
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		60 Laporan	74.200.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat		80.000.000
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	50.000.000		-	75.000.000
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 Unit	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat		75.000.000
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	2.000.000		-	6.000.000
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	2.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat		6.000.000
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	12.877.500		-	21.500.000
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	3.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat		6.500.000
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	9.877.500	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat		15.000.000
7	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-	-	1.350.000.000		-	1.850.000.000

						MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	750.000.000		-	1.200.000.000
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		7 Unit	450.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat		850.000.000
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		13 Pokmas / Ormas	300.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat		350.000.000
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-	600.000.000		-	650.000.000
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		12 Lembaga Kemasyarakatan	600.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat		650.000.000
8	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	10.000.000		-	25.000.000

	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	10.000.000		-	25.000.000
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		20 Orang	10.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat		25.000.000
						Kelurahan Kampung Lama				1.412.877.500			1.987.850.000
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.412.877.500			1.987.850.000
	7	01				KECAMATAN				1.412.877.500			1.987.850.000
9	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	212.877.500		-	267.850.000
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	129.100.000		-	165.850.000
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	10.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		11.000.000
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	30.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		40.000.000
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	18.500.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		20.000.000
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1.750.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		6.000.000
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50 Laporan	68.850.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		88.850.000

	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	67.000.000		-	80.000.000
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Kelurahan Unit	67.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		80.000.000
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	2.000.000		-	5.000.000
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	2.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		5.000.000
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	14.777.500		-	17.000.000
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 Unit	4.900.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		7.000.000
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	9.877.500	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		10.000.000
10	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	20.000.000		-	25.000.000
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	20.000.000		-	25.000.000
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							

							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 Dokumen	20.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		25.000.000
11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	1.170.000.000		-	1.675.000.000
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	770.000.000		-	1.175.000.000
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 Lembaga Kemasyarakatan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		-
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		6 Unit	450.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		800.000.000
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		8 Pokmas / Ormas	300.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		350.000.000
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan							

							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		1 Laporan	20.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		25.000.000
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-	400.000.000		-	500.000.000
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		8 Lembaga Kemasyarakatan	400.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		500.000.000
12	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	10.000.000		-	20.000.000
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	10.000.000		-	20.000.000
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		20 Orang	10.000.000	-		20.000.000
						Kelurahan Teluk Pemedas				1.439.877.500			1.980.853.000
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.439.877.500			1.980.853.000
	7	01				KECAMATAN				1.439.877.500			1.980.853.000
13	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	179.877.500		-	215.853.000
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	95.910.000		-	115.092.000
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	10.500.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas		12.600.000
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	20.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas		24.000.000
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		7 Paket	9.884.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas		11.860.800
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	2.636.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas		3.163.200
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		40 Laporan	52.890.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas		63.468.000
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	60.000.000		-	72.000.000
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6 Unit	60.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas		72.000.000
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	9.260.000		-	11.112.000
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	2.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas		2.400.000
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		6 Laporan	7.260.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas		8.712.000
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	14.707.500		-	17.649.000
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6 Unit	4.830.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas		5.796.000

	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	9.877.500	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas		11.853.000
14	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	1.250.000.000		-	1.740.000.000
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	750.000.000		-	1.190.000.000
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		9 Unit	450.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas		840.000.000
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		11 Pokmas / Ormas	300.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas		350.000.000
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-	500.000.000		-	550.000.000
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		10 Lembaga Kemasyarakatan	500.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas		550.000.000
15	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	10.000.000		-	25.000.000
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	10.000.000		-	25.000.000
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		20 Orang	10.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas		25.000.000
						Kelurahan Handil Baru				1.643.877.500			1.875.877.500
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.643.877.500			1.875.877.500
	7	01				KECAMATAN				1.643.877.500			1.875.877.500
16	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	-	183.877.500		-	200.877.500

						PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	98.000.000		-	105.000.000
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		15 Paket	15.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru		18.000.000
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		8 Paket	20.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		15.000.000
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		5 Paket	12.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru		14.000.000
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru		3.000.000
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		33 Laporan	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru		55.000.000
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	55.487.200		-	60.487.200
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3 Unit	55.487.200	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru		60.487.200
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	2.000.000		-	3.000.000
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	2.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru		3.000.000
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	28.390.300		-	32.390.300
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12 Unit	8.512.800	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru		10.512.800
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	19.877.500	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru		21.877.500
17	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	1.450.000.000		-	1.655.000.000
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	750.000.000		-	905.000.000
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		7 Unit	450.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru		695.000.000
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							

							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		19 Pokmas / Ormas	300.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru		210.000.000
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-	700.000.000		-	750.000.000
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		15 Lembaga Kemasyarakatan	700.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru		750.000.000
18	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	10.000.000		-	20.000.000
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	10.000.000		-	20.000.000
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		20 Orang	10.000.000	-		20.000.000
						Kelurahan Sungai Seluang				1.807.680.500			2.472.216.600
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.807.680.500			2.472.216.600
	7	01				KECAMATAN				1.807.680.500			2.472.216.600
19	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	197.680.500		-	237.216.600
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	24.000.000		-	28.800.000
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	24.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang		28.800.000
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	102.743.000		-	123.291.600
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		8 Paket	11.554.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang		13.864.800
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		15 Paket	27.445.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang		32.934.000
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	12.244.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang		14.692.800
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1.500.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang		1.800.000
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		29 Laporan	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang		60.000.000
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	50.000.000		-	60.000.000
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3 Unit	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang		60.000.000
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	8.060.000		-	9.672.000

	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	2.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang		2.400.000
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		6 Laporan	6.060.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang		7.272.000
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	12.877.500		-	15.453.000
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		11 Unit	3.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang		3.600.000
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	9.877.500	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang		11.853.000
20	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-	-	1.600.000.000		-	2.210.000.000

						MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	750.000.000		-	1.310.000.000
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		7 Unit	450.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang		960.000.000
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		17 Pokmas / Ormas	300.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang		350.000.000
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-	850.000.000		-	900.000.000
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		17 Lembaga Kemasyarakatan	850.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja,		900.000.000

											Sungai Seluang		
21	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	10.000.000		-	25.000.000
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	10.000.000		-	25.000.000
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		20 Orang	10.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang		25.000.000
						Kelurahan Wonotirto				1.387.877.500			1.758.153.000
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.387.877.500			1.758.153.000
	7	01				KECAMATAN				1.387.877.500			1.758.153.000
22	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	-	227.877.500		-	282.153.000

						DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	155.500.000		-	195.300.000
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	12.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto		14.400.000
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	20.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto		24.000.000
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		10 Paket	17.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto		20.400.000
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	3.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto		12.000.000
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		87 Laporan	103.500.000	Kab. Kutai Kartanegara,		124.500.000

											Samboja, Wonotirto		
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	50.000.000		-	60.000.000
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3 Unit	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto		60.000.000
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	2.500.000		-	3.000.000
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	2.500.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto		3.000.000
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	19.877.500		-	23.853.000
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	10.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto		12.000.000
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	9.877.500	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto		11.853.000
23	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	1.150.000.000		-	1.456.000.000
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	750.000.000		-	956.000.000
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		8 Unit	450.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto		876.000.000
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	300.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto		80.000.000
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-	400.000.000		-	500.000.000
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		8 Lembaga Kemasyarakatan	400.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto		500.000.000
24	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	10.000.000		-	20.000.000
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	10.000.000		-	20.000.000
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		20 Orang	10.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto		20.000.000
						Kelurahan Tanjung Harapan				1.497.227.500			1.724.673.000

	7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.497.227.500			1.724.673.000
	7	01				KECAMATAN				1.497.227.500			1.724.673.000
25	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	187.227.500		-	224.673.000
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	103.874.000		-	124.648.800
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		10 Paket	10.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan		12.000.000
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	20.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan		24.000.000
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		5 Paket	20.677.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan		24.812.400
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	3.197.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan		3.836.400
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30 Laporan	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan		60.000.000
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	61.486.000		-	73.783.200
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		8 Unit	61.486.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan		73.783.200
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	8.990.000		-	10.788.000
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	2.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan		2.400.000
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		6 Laporan	6.990.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan		8.388.000
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	12.877.500		-	15.453.000
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	3.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan		3.600.000

	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	9.877.500	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan		11.853.000
26	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	1.300.000.000		-	1.475.000.000
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	750.000.000		-	950.000.000
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		9 Unit	450.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan		840.000.000
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		13 Pokmas / Ormas	300.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan		110.000.000
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-	550.000.000		-	525.000.000
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		11 Lembaga Kemasyarakatan	550.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan		525.000.000
27	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	10.000.000		-	25.000.000
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	10.000.000		-	25.000.000
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		20 Orang	10.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan		25.000.000
						Kelurahan Kuala Samboja				1.964.995.500			2.180.990.650
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.964.995.500			2.180.990.650
	7	01				KECAMATAN				1.964.995.500			2.180.990.650
28	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	-	204.995.500		-	225.495.050

						PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	10.710.000		-	11.781.000
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	10.710.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa		11.781.000
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	116.878.000		-	128.565.800
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	10.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala		11.000.000
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		11 Paket	20.128.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala		22.140.800
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		10 Paket	8.480.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa		9.328.000
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		10 Paket	3.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala		3.300.000
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		61 Laporan	75.270.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala		82.797.000
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	50.000.000		-	55.000.000
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3 Unit	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala		55.000.000
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	10.470.000		-	11.517.000

	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	2.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala		2.200.000
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		7 Laporan	8.470.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala		9.317.000
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	16.937.500		-	18.631.250
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6 Unit	7.060.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala		7.766.000
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	9.877.500	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala		10.865.250
29	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-	-	1.750.000.000		-	1.930.495.600

						MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	750.000.000		-	830.495.600
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 Lembaga Kemasyarakatan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala		-
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		6 Unit	450.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala		720.495.600
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		23 Pokmas / Ormas	300.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala		110.000.000
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-	1.000.000.000		-	1.100.000.000
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		20 Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja,		1.100.000.000

											Samboja Kuala		
30	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	10.000.000		-	25.000.000
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	10.000.000		-	25.000.000
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		20 Orang	10.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala		25.000.000
						Kelurahan Sanipah				1.874.877.500			2.079.877.500
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.874.877.500			2.079.877.500
	7	01				KECAMATAN				1.874.877.500			2.079.877.500

31	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	214.877.500		-	214.877.500
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	14.000.000		-	14.000.000
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	14.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah		14.000.000
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	126.040.000		-	126.040.000
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		15 Paket	13.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		13.000.000
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	20.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah		20.000.000
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	14.560.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah		14.560.000
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	4.280.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah		4.280.000
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		60 Laporan	74.200.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah		74.200.000
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	50.000.000		-	50.000.000
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah		50.000.000
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	8.260.000		-	8.260.000
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	2.200.000	Kab. Kutai Kartanegara,		2.200.000

											Samboja, Sanipah		
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		6 Laporan	6.060.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah		6.060.000
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	16.577.500		-	16.577.500
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	6.700.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah		6.700.000
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	9.877.500	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah		9.877.500
32	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	1.650.000.000		-	1.840.000.000
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	750.000.000		-	850.000.000
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							

							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		9 Unit	450.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah		500.000.000
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		18 Pokmas / Ormas	300.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah		350.000.000
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-	900.000.000		-	990.000.000
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		18 Lembaga Kemasyarakatan	900.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah		990.000.000
33	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	10.000.000		-	25.000.000
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	10.000.000		-	25.000.000
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		20 Orang	10.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah		25.000.000
						Kelurahan Muara Sembilang				1.707.877.500			2.099.263.000
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.692.077.500			2.081.963.000
	7	01				KECAMATAN				1.692.077.500			2.081.963.000
34	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	212.077.500		-	345.963.000
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	135.500.000		-	257.263.000
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	14.817.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang		15.000.000
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	22.030.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang		44.030.000
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		10 Paket	35.813.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang		76.813.000
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	4.960.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang		5.660.000
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		80 Laporan	57.880.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang		115.760.000

	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	50.000.000		-	55.000.000
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4 Unit	50.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang		55.000.000
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	16.700.000		-	23.000.000
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	4.300.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang		9.400.000
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		3 Laporan	12.400.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang		13.600.000
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	9.877.500		-	10.700.000
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	9.877.500	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang		10.700.000
35	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	10.000.000		-	15.000.000
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	10.000.000		-	15.000.000
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 Dokumen	10.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang		15.000.000
36	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	1.460.000.000		-	1.696.000.000
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	760.000.000		-	896.000.000
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 Lembaga Kemasyarakatan	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang		-
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		10 Unit	450.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang		665.000.000
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		14 Pokmas / Ormas	300.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang		220.000.000
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan							
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		2 Laporan	10.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang		11.000.000
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-	700.000.000		-	800.000.000
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		14 Lembaga Kemasyarakatan	700.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang		800.000.000
37	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	10.000.000		-	25.000.000
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	10.000.000		-	25.000.000
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		20 Orang	10.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang		25.000.000
	X					NON URUSAN				15.800.000			17.300.000
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				15.800.000			17.300.000
38	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	15.800.000		-	17.300.000

	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	15.800.000		-	17.300.000
	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6 Unit	15.800.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang		17.300.000
	J U M L A H									52.606.047.421			78.782.600.250

BAB V

P E N U T U P

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Samboja Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Samboja tahun 2021 – 2026 dan merupakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Samboja Periode Tahun 2025.

Bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Samboja Tahun 2025 dimaksud untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan serta dengan Rencana Kerja Kecamatan Samboja Tahun 2025 ini juga diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Untuk itu mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ini, akan diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Kutai Kartanegara. Demikian untuk dilaksanakan.

xx.RENJA KECAMATAN ANGGANA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai social cultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa,pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa danbernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good Governance* yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas danefesiensi. Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonomi karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat semakin komplek tugas camat, perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif Perencanaan pembangunan,pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan Perekonomian di tingkat Kecamatan yang dalampelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik ditingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadayamasyarakat.

Dan dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa

setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan Tahunan.

Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana PembangunanJangkaPanjang(RPJP)Daerah,RencanaPembangunanJangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi "KUKAR IDAMAN" yang dicanangkan sejak terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2021-2026 serta keberhasilan (*success story*) pada pelaksanaan pembangunan sebelumnya yakni GERBANG RAJA yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada periodesebelumnya.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9 Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10 Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

14 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

15 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

16 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3 Maksud danTujuan

1. Maksud :

Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Anggana selama Tahun 2025 dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD dan Renstra Kecamatan.

2 Tujuan :

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Camat Anggana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 LandasanHukum
- 1.3 Maksud danTujuan
- 1.4 SistematikaPenulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja -PD Tahun Lalu dan CapaianRenstra-PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PerangkatDaerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan AwalRKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan KegiatanMasyarakat

BABIII TUJUAN, SASARAN PERANGKATDAERAH
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Program dan Kegiatan
BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan CapaianRenstra-PD

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan.

Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan Tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Recana Kerja (Renja) Kecamatan Anggana Tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan Visi Kukar Idaman yaitu “MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA” dengan misi 1 Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani serta misi 4 Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bias dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan Tahun sebelumnya,sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di Tahun-Tahun mendatang. Pada Tahun anggaran 2025 Kecamatan Anggana telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya dan telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu:

a. Menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.

b. Menyusun Rencana Kerja PerangkatDaerah

Evaluasi pelaksanaan Renja-PD merupakan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu (Tahun n-2/2023) dan perkiraan capaian Tahun berjalan (Tahun n-1/2024), mengacu pada APBD Tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja-PD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PDTahun-Tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD Tahun lalu, dan realisasi Renstra- PD.Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, pelaksanaan kinerja Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan Perangkat Daerah Belanja Langsung Urus Wajib dan Pilihan (Program), sebagaimana dijabarkan dalam Tabel T-C.29 sebagai berikutIndonesia Nomor 4438);

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama OPD : Kecamatan Anggana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target program / kegiatan (Renja- PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja-PD Tahun (2023)	Realisasi Renja-PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50	10	10	10	100%	10	40	80%

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	70	14	14	14	100%	14	42	60%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadministrasikan	1655	331	331	331	100%	331	993	60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	40	8	8	8	100%	8	32	80%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	82	10	18	18	100%	18	54	66%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60	12	12	12	100%	12	36	60%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang dipelihara	115	10	115	115	100%	115	115	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan Camat	10	2	2	2	100%	2	8	80%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	16	0	16	16	100%	16	16	100%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Jumlah Desa Yang difasilitasi	8	0	8	8	100%	8	8	100%

	Pengawasan Pemerintahan Desa									

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat program dan kegiatan yang belum memenuhi target. Adapun program dan kegiatan yang belum memenuhi target disebabkan karena beberapa hal, antara lain :

a. Perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengankebutuhan.
b. Nilai pada APBD lebih kecil dari nilai padaRenja.

Hal-hal yang diambil dalam mengatasi hal-hal tersebut adalah:

a. Melakukan pergeseran anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan.
b. Mengurangi dan menghapus beberapa kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal).Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua)urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupatiyang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien. Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Anggana selama kurun waktu Tahun 2021 – 2022 diharapkan cukup memuaskan. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Anggana, yaitu:

a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
b. Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa;
c. Persentase Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa;

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat dalam table T-C.30 sebagai berikut

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator*)	SPM/standar nasional	IKK		Target Renstra-PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				B	B	B	B			B	B	
	Jumlah Dokumen			9	9	9	9	9	9	9	9	9	
	Jumlah laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			10	2	2	2	6	2	2	2	2	
	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan			10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah			5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah			12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa			8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	Jumlah Kegiatan			4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100	100	100	100	100	100	100	100	100	

	Jumlah Desa yang difasilitasi			8	8	8	8	8	8	8	8	8	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis terkait dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD. Dan bagaimana dampaknya terhadap percapaian visi dan misi, target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatan pelayanan SKPD.

Pelayanan di Kecamatan Anggana pada umumnya telah berjalan dengan baik walaupun ada permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam peyelenggaraan tugas dan fungsinya. Kecamatan Anggana sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Anggana masih memerlukan peningkatan pelayanan untuk menghadapi tantangan kedepan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Belum optimalnya koordinasi linmas.
2. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan dikecamatan.
3. Belum optimalnya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan.
4. Belum optimalnya pelayanan PATEN dan pelayanan sarana dan prasarana umum wilayah kecamatan.
5. Belum optimalnya pelayanan dan koordinasi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, keagamaan, budaya, dan lembaga kemasyarakatan.
6. Belum optimalnua kinerja dan tata kelola kecamatan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Anggana, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada dikecamatan.
2. Meningkatkan urusan pemberdayaanmasyarakat.

3. Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Meningkatnya penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Meningkatkan pemeiliharaan prasarana dan layanan umum.
6. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan perrangkat daerah di tingkatkecamatan.
7. Meningkatkkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa.

Permasalahan internal dan eksternal yang dihadapi akan berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Adapun Hal-hal yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada para staf kecamatan tentang tugas dan fungsi kecamatan serta keahlian yang harus dipelajari dan dimiliki oleh setiap staf.
2. Memaksimalkan rapat koordinasi pertriwulan dalam rangka melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan pemberdayaan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa.
3. Melibatkan pihak perusahan dalam kegiatan Musrenbang desa dan Musrenbang Kecamatan dalam rangka sinkronisasi rencana kegiatan pemerintahan desa yang bisa dibantu dilaksanakan oleh pihakperusahaan.

Dari beberapa aspek permasalahan yang dihadapi sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa potensi yang dimiliki antara lain:

1. Potensi dibidang perikanan yaitu adanya beberapa desa di sekitaran pesisir yang merupakan lokasi usaha perikanan baik kegiatan budidaya maupun kegiatan perikanan tangkap oleh nelayan.
2. Potensi Perkebunan Kelapa Sawit di desa Kutai Lama.
3. Banyak pelaku UKM di 8 (delapan) desa yang semakin bertambah sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraanmasyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun anggaran 2025 Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada Tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai lampiran dengan tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Anggana

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Anggana	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70 Nilai	7.173.658.017	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Anggana	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B Nilai	7.173.658.017	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Anggana	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 dokumen	605.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Anggana	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	605.000.000	
	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen	Dokumen 1	300.000.000	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen	Dokumen 1	300.000.000	
	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen	Dokumen 1	25.000.000	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen	Dokumen 1	25.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen	Dokumen 1	60.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen	Dokumen 1	60.000.000	

	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	140,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	140,000,000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan penyusunan RKA- SKPD	1 dokumen	5,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan penyusunan RKA- SKPD	1 dokumen	5,000,000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Laporan Hasil koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD	1 dokumen		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Laporan Hasil koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD	1 dokumen		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Laporan Hasil koordinasi dan penyusunan Capaian Kinerja	2 Dokumen	70,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Laporan Hasil koordinasi dan penyusunan Capaia	2 Dokumen	70,000,000	

	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	5 Dokumen	4,854,586,114	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Anggana	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	5 Dokumen	4,854,586,114	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Anggana	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	34 Orang/ 12 Bulan	4.692.266.114	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Anggana	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	34 Orang/ 12 Bulan	4.692.266.114	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan penyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan penyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	25.000.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis program SKPD	1 Dokumen	25.000..000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis program SKPD	1 Dokumen	25.000..000	

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Seme steran SKPD	2 Dokumen	103,320,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semes teran SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	2 Dokumen	103,320,000	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Anggana	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	331 unit	255.000.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Anggana	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Diadministrasikan	331 unit	255.000.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Anggana	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	25,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Anggana	Jumlah dokumen Perencanaan KebutuhanBarang Milik DaerahSKPD	2 dokumen	25.000.000	
	Sub Kegiatan Pengaman barang milik daerah	Kec. Anggana	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.000	Sub Kegiatan Pengaman barang milik daerah	Kec. Anggana	Jumlah Laporan	1 Laporan	150.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Milik Daerah pada SKPD	2 Dokumen	50,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Milik Daerah pada SKPD	2 Dokumen	50,000,000	

	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Milik Daerah pada SKPD	2 Dokumen	30.000.000	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Milik Daerah pada SKPD	2 Dokumen	30.000.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Anggana	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	1 Paket	43,000,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Anggana	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	1 Paket	43.000.000	
	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kec. Anggana	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang mendapatkan peningkatan	2 unit	-	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kec. Anggana	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang mendapatkan peningkatan	2 unit	-	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Anggana	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	1 Paket	43,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Anggana	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	1 Paket	43,000,000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Anggana	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	20 jenis	304.291.923	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Anggana	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	20 jenis	304.291.923	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan	Kec. Anggana	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1 Paket	97,216,986	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec. Anggana	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1 Paket	97.216.986	

	Perlengkapan Kantor		disediakan			Kantor		disediakan			
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Anggana	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 unit	0	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Anggana	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 unit	0	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Anggana	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	34,088,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Anggana	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1210 Porsi	34.088.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Anggana	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	5,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Anggana	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	5,000,000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Anggana	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitas	60 kali	0	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Anggana	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitas	60 kali	0	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	102 Laporan	152,986,937	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	102 Laporan	152,986,937	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	500 Dokumen	15,000,000	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Anggana	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	500 Dokumen	15,000,000	
	Kegiatan Pemeliharaan	Kec. Anggana	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang	10 unit	75.200.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang	Kec. Anggana	Jumlah Barang Milik Daerah	10 unit	75.200.000	Kegiatan Pemelihar

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Anggana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan dipelihara	10	Unit	25.200.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Anggana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	10	unit	25.200.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Anggana	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	104	Unit	-	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Anggana	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	104	unit	-
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Anggana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	1	Unit	50.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Anggana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	1	unit	50.000.000

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	5	Kegiatan	-	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	5 kegiatan	-

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Anggana	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	26	Unit	675.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Anggana	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	26 unit	675.000.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Anggana	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1	unit	180,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Anggana	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	180,000,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilakukan sesuai SOP	100	persen		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilakukan sesuai SOP	100 persen	
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kec. Anggana	Jumlah Mebel Yang Diadakan	5	Unit	14.491.065.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kec. Anggana	Jumlah Mebel Yang Diadakan	5 unit	14.491.065.000
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Anggana	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	10	unit	50,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Anggana	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	10 unit	50,000,000
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Anggana	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	1	unit	445.000.000-	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Anggana	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	1 unit	445.000.000-
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Anggana	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	bulan	370.579.980	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Anggana	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	598.160.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Anggana	Jumlah surat menyurat	12	Bulan		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Anggana	Jumlah surat menyurat	12 Bulan	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air danListrik	Kec. Anggana	Jumlah waktupenyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik	12	bulan	184,136,966	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air danListrik	Kec. Anggana	Jumlah waktupenyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik	12 bulan	405.160.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Anggana	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Anggana	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	-
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Anggana	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	bulan	186,443,014	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Anggana	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	193.000.000

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Anggana	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	4 Laporan	14.491.065.000	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Anggana	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	4 Laporan	14.491.065.000
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Anggana	Jumlah perizinan non usaha yang dikeluarkan Kecamatan	0 Berkas	-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Anggana	Jumlah perizinan non usaha yang dikeluarkan Kecamatan	0 Berkas	-
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Anggana	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	0 aporan	741.065.000-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Anggana	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	0 Berkas	741.065.000-
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Anggana	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	2 egiatan	13.750.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Anggana	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	2 kegiatan	13.750.000.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Anggana	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 persen	100.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Anggana	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 persen	100.000.000
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Anggana	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa	16 kali	100.000.000	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Anggana	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa	16 kali	100.000.000

Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Anggana	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	150 Orang	50.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Anggana	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	150 Orang	50.000.000

Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana oleh pihak Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0 egiatan	-	Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan OlehPemerintah dan Swasta diWilayah Kerja Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana oleh pihak Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0 Kegiatan	-
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	5 egiatan	50.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	5 Kegiatan	50.000.000

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Anggana	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100	ersen	185.000.000-	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Anggana	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100 Persen	185.000.000 -
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Anggana	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	500	orang	185.000.000-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Anggana	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	500 Kor orang	185.000.000-
Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Anggana	Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh Masyarakat	500	Orang	180.000.000 -	Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Anggana	Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh Masyarakat	500 K Orang	180.000.000 -
Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1	Kegiatan	5,000,000 -	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1 Kegiatan	5,000,000 -

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Anggana	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	Persen	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Anggana	CAKUPAN PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 Persen -
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Anggana	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	2	Kegiatan	-	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Anggana	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	2 Kegiatan -
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Anggana	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Anggana	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen 0
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Anggana	Jumlah Desa Yang difasilitasi	8	Desa	0	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Anggana	Jumlah Desa Yang difasilitasi	8 Desa 0
Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kec. Anggana	Jumlah desa yang difasilitasi	8	Desa	0	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kec. Anggana	Jumlah desa yang difasilitasi	8 Desa 0
Sub Kegiatan Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Kec. Angganana	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan desa yang sudah diterapkan	8	Peraturan	-	Sub Kegiatan Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Kec. Angganana	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan desa yang sudah diterapkan	8 Peraturan -

Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan pilkades	8 Desa	-	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Anggana	Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan pilkades	8 Desa	-
Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan Pembangunan desa yang disinkronkan	8 kegiatan	-	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan Pembangunan desa yang disinkronkan	8 kegiatan	-
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Difasilitasi	1 Dokumen	0	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi	1 Dokumen	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan	1 Kegatain	400.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan	1 Kegatain	400.000.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan	1 Kegatain	250.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan	1 Kegatain	250.000.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan	1 Kegatain	150.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan	1 Kegatain	150.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan	1 Kegatain	100.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan	1 Kegatain	100.000.000

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan	1 Kegatain	100.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan	1 Kegatain	100.000.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah Lembaga	5 Lembaga	486.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Anggana	Jumlah Lembaga	5 Lembaga	486.000.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Anggana	Jumlah Lembaga	5 Lembaga	486.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Anggana	Jumlah Lembaga	5 Lembaga	486.000.000
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Anggana	Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	175.000.000	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Anggana	Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	175.000.000
Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Kegiatan	175.000.000	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Anggana	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Kegiatan	175.000.000
JUMLAH				23.110.723.017	JUMLAH				23.338.303.037

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan Kecamatan Anggana pada Tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah yang diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitasaparaturnya.
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa.
3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Berikut tabel Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Anggana maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kec.Anggana

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Sub Kegiatan	Lokasi	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Terjadinya Penyumbatan saluran Drainase	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Sungai Mariam, Anggana, Kutai lama, Handil Terusan , Sidomulyo	1000 Meter	
2	Pekerjaan Sederhana tidak menambah Aset (Pembersihan Rumput/semak belukar/gulma,sedimentasi lumpur)	Masih terbatasnya Mesin Rumput dan Obat - Obatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Sungai Mariam, Anggana, Kutai lama, Handil Terusan , Sidomulyo	1000 meter	
3	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana	Belum tersedianya jalan jembatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Handil Terusan, Muara Pantuan, Tani Baru, Sepatin	3 x 1000 Meter	

			Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
4	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana	Masih belum tersedianya pondasi gorong-gorong	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Sungai Mariam, Anggana, Kutai lama, Handil Terusan , Sidomulyo	2 x 1000 Meter	
5	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana	Masih Kurangnya Pembangunan Turap	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Sungai Mariam, Anggana, Kutai lama, Handil Terusan , Sidomulyo, Tani Baru	Lebar Atas 30 cm, lebar bawah 50 cm, tinggi 1 meter	
6	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Rusaknya Jalan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Sungai Mariam, Anggana, Kutai lama, Handil Terusan , Sidomulyo	3 x 1000 Meter	
7	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Jembatannya sudah tidak layak di gunakan oleh masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Handil Terusan, Tani Baru, Muara Pantuan, Sepatin, Sungai Mariam, Anggana	3 x 3 Meter	

			dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
8	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan	Tidak adanya jaringan pipa air bersih	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara pantuan, tani baru, sepatin, handil terusan, kutai lama	5000 Meter	
9	Pembangunan dan Perbaikan MCK Umum Kecamatan	Masih Kurangnya Pembangunan Toilet	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Desa Kecamatan Anggana	60 m²	
10	Pembuatan Tempat Sampah Penampungan Sementara Kecamatan	Masih belum terkelolanya penanganan sampah rumah tangga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa Sungai Mariam, Desa Anggana, Desa Kutai Lama, Desa Handil Terusan, Desa Sidomulyo	50 Unit	
11	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan	Masih belum tersedianya Sekretariat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Kec. Anggana	60 m²	

			yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
12	Pembangunan Pos Keamanan Kecamatan	masih belum tersedianya Pos Kamling & Pos damkar	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Anggana	6 m^2	
13	Pembangunan Taman Pendidikan Alquran Kecamatan	Kec. Anggana	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Anggana	60 m^2	
14	Pemeliharaan Penerangan Bangunan di Kecamatan	Masih kurangnya perawatan penerangan jalan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Anggana	200 titik	
15	Pelatihan, Pembinaan dan Pendampingan Bagi Usaha Mikro Olahan Buah, Sayuran dan IKAN	Kurangnya SDM terkait Pembinaan dan		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	300 Orang	

		Pendampingan bagi Usaha Mikro				
16	Penyediaan Pakan Ikan	Pakan ikan belum tersedia sesuai dengan kebutuhan pembudidaya ikan		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	130.000 Kg	
17	Penyediaan Benih Ikan / Udang	Benih ikan/udang belum tersedia sesuai dengan kebutuhan pembudidaya ikan		Sungai Mariam, Handil Terusan, Anggana, Kutai Lama, Sepatin, Muara Pantuan, Tani Baru	1.202.000 Ekor ikan 9,600,000 ekor udang	
18	Penyediaan Probiotik	Probiotik belum tersedia sesuai dengan kebutuhan pembudidaya ikan		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	10.000 Liter	
19	Penyediaan Pupuk untuk Kolam dan Tambak	Pupuk belum tersedia sesuai dengan kebutuhan pembudidaya ikan		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	6.000 Kg	
20	Penyediaan Kolam Terpa	Kolam terpal belum tersedia sesuai dengan kebutuhan pembudidaya ikan		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	100 Unit	
21	Perbaikan Pintu Air Tambak	Banyaknya pintu air tambak yang kondisinya rusak		Muara pantuan, tani baru, sepatin	20 Unit	
22	Penyediaan Benih Rumput Laut	Terbatasnya ketersediaan benih rumput laut untuk pembudidaya		Tani Baru	10.000 Kg	
23	Persiapan dan Pematangan Lahan Budidaya Rumput Laut	Kurang maksimalnya persiapan dan pematangan lahan budidaya rumput laut		Tani Baru	50 Ha	
24	Sarana Penunjang Tempat Pelelangan Ikan	Belum adanya tempat		Kecamatan Anggana	2 Unit	

		pelelangan ikan				
25	Pengadaan Bahan Pembuatan Alat Tangkap Ikan (Jaring)	Terbatasnya kemampuan nelayan untuk pengadaan alat tangkap ikan (kawat tempirai)		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	3,260 Pcs	
26	Penyediaan Mesin Kapal/Perahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT	Banyaknya mesin kapal/perahu penangkapan ikan 0 - 5 GT yang sudah tidak layak pakai		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	600 Unit	
27	Penyediaan Kapal/Perahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT	Banyaknya kapal/perahu penangkapan ikan 0 - 5 GT yang sudah tidak layak pakai		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	600 Unit	
28	Penyediaan Cool Box	Kurangnya ketersediaan cool Box untuk nelayan dan pembudidaya ikan		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	100 Unit	
29	Penyediaan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan (Mixer, Sealer, Blender, Mesin Pengering)	Terbatasnya ketersediaan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan (Mixer, Sealer, Blender, Mesin Pengering)		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	25 Unit	
30	Penyediaan Freezer	Kurangnya keterseiaan Frezeer yang dimiliki pengolah dan pemasara hasil perikanan		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	50 Unit	
31	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pengadaan Pupuk)	Kurangnya Pupuk		Handil Terusan, Sidomulyo, Kutai Lama	20 Ha/ 40 Ha	
32	Pelatihan Kelompok Tani (Poktan)	Kurangnya Pengetahuan Petani		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	20 BPP	
33	Pengadaan Benih Hortikultura	Kurangnya Benih		8 DESA KECAMATAN	50 HA	

		Hortikultura		ANGGANA		
34	Pengadaan Alsintan	Terbatasanya Alsintan		Sungai Mariam, Handil Terusan, Anggana, Kutai Lama,Sidomulyo	3012 Unit	
35	Pengadaan bibit Ternak Sapi	Kurangnya bibit ternak		Sungai Mariam, Handil Terusan, Anggana, Kutai Lama,Sidomulyo	92 Ekor	
36	Pengadaan bibit Ternak Kambing	Kurangnya bibit ternak		Sungai Mariam, Handil Terusan, Anggana, Kutai Lama,Sidomulyo	64 ekor	
37	Fasilitasi Pelatihan Olahan Pangan dan sertifikasi Halal bagi IKM	Masih Kurangnya Pengetahuan dan keterampilan dan perlu mendapatkan sertifikat bagi IKM		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	50 orang/IKM/ Sertifikat	
38	Revitalisasi pasar Desa dan Kecamatan	Rusaknya Kondisi Pasar		Kecamatan Anggana	6	
39	Pengadaan Teknologi Pengolahan Sampah (Insenerator Pengolahan Sampah)	Tidak adanya alat Teknologi dan Kurangnya Pengolahan Sampah		Sungai Mariam, Anggana,Kutai Lama, Handil Terusan	4 Unit	
40	Pengadaan Teknologi Pengolahan Sampah (Insenerator Pengolahan Sampah)	Tidak adanya alat Teknologi dan Kurangnya Pengolahan Sampah		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	3 Unit	
41	Pembangunan/Rehabilitasi Lantai Jemur	Belum tersedianya lantai jemur yang representatif		Kutai Lama, Tani Baru, Anggana, Sungai Mariam, Sidomulyo, Muara Pantuan,Handil Terusan	5 Kegiatan	
42	Peningkatan kapasitas SDM Pokdarwis	Kurangnya Kapasitas SDM Pokdarwis		Kutai Lama	10 Paket	
43	penyediaan amenitas, atraksi dan sapras di DTW yang	Mininya amenitas, atraksi		8 DESA KECAMATAN	20 orang	

	dikelola Pokdarwis dan DesaWisata	dan sapras		ANGGANA		
44	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (photografi, film, musik)	Minimnya Kompetensi dan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	80 Orang	
45	Pelatihan Pemuda untuk Berwirausaha (Wirausaha Perseorangan untuk Pemula)	Minimnya Pengetahuan berwirausaha		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	4 Unit	
46	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan di dunia usaha	Kurangnya Sarana Prasarana		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	1 Organisasi	
47	Pelatihan Anggota Organisasi Kepemudaan dalam berwirausaha	Minimnya Pengetahuan berwirausaha		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	9 Unit	
48	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Prestasi	Masih terbatasnya Sarana dan prasarana olahraga prestasi		Sungai Mariam, Sidomulyo	2 Organisasi	
49	Fasilitasi Organisasi keolahragaan	Minimnya Organisasi Keolahragaan		Sidomulyo,Kutai Lama, kec.anggana	3 Event	
50	Event Olahraga Tradisional dan Rekreasi	Masih terbatasnya Olahraga dan kreasi		Sungai Mariam,Anggana,Sidomulyo, Muara Pantuan, Kutai Lama	5 Unit	
51	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Masih belum adanya Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat		Kutai Lama, Handil Terusan	2 Event	
52	Event Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Masih terbatasnya olahraga wisata, tantangan, dan Petualangan		Kecamatan Anggana	1 Perpustakaa n digital	
53	Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan digital	Kurangnya Sarana Prasarana digital		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	289 Lembaga	
54	Sarana Prasarana Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (Karang Taruna, Panti Asuhan, Panti	Masih belum adanya Sarana dan Prasarana		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	309 Orang	

	Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan,)	Panti Sosial Masyarakat				
55	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Masih belum adanya SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	100 Keluarga	
56	Pengembangan Ekonomi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)			8 DESA KECAMATAN ANGGANA	12 paket	
57	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Mesin Pompa, Selang, Nozle, Conection, baju tahan panas, sepatu, helm) (Karhutla)	Kurangnya Alat Pemadam Kebakaran		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	75 Orang	
58	Pelatihan Relawan BALAKARCANA dan Masyarakat Peduli Api (MPA)	Minimnya Pengetahuan tanggap bencana		Desa Sepatin kec.Anggana	7 Unit	
59	Fasilitasi sarana prasarana desa	Belum adanya Fasilitas sarana prasarana desa		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	47 Unit	
60	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Belum adanya Fasilitas Gedung Posyandu		Kec. Anggana	3 Media	
61	Kerjasama Media (Online/Cetak/Radio/Videotr on/TV)	Belum adanya Kerjasama Media		Kec. Anggana	3 paket	
62	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM			8 DESA KECAMATAN ANGGANA	20 Orang	
63	Pelatihan Scafolding	Masih Kurangnya Pengetahuan dan keterampilan		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	20 Orang	
64	Pelatihan Rigger	Masih Kurangnya Pengetahuan dan keterampilan		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	20 Orang	

65	Pelatihan Foklift	Masih Kurangnya Pengetahuan dan keterampilan		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	60 Orang	
66	Pelatihan Mekanik Alat Berat	Masih Kurangnya Pengetahuan dan keterampilan		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	20 Orang	
67	Pelatihan Operator Alat Berat (Dozer, Loader, DT, HD dan Eksavator)	Masih Kurangnya Pengetahuan dan keterampilan		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	60 Orang	
68	Pelatihan Instrumen Level 1	Masih Kurangnya Pengetahuan dan keterampilan		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	20 Orang	
69	Pelatihan Ahli K3 Umum	Masih Kurangnya Pengetahuan dan keterampilan		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	60 Orang	
70	Diksar Gada Pratama	Masih Kurangnya Pengetahuan dan keterampilan		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	40 Orang	
71	Pelatihan Welder 3G	Masih Kurangnya Pengetahuan dan keterampilan		Kec. Anggana	2 BLK	
72	Pengadaan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK)	Masih Kurangnya Pengetahuan dan keterampilan		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	35 Orang	
73	Pembekalan Menjahit	Masih Kurangnya Pengetahuan dan keterampilan		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	50 Orang	
74	Pembekalan Tata Boga	Masih Kurangnya Pengetahuan dan keterampilan		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	30 Orang	

75	Pembekalan Tata Rias	Masih Kurangnya Pengetahuan dan keterampilan		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	20 Orang	
76	Pembekalan Bengkel Motor	Masih Kurangnya Pengetahuan dan keterampilan		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	20 Orang	
77	Pembekalan Bengkel Las	Masih Kurangnya Pengetahuan dan keterampilan		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	20 Orang	
78	Pembekalan Servis Mesin Cas	Masih Kurangnya Pengetahuan dan keterampilan		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	20 Orang	
79	Pembekalan Barber Shop	Masih Kurangnya Pengetahuan dan keterampilan		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	20 Orang	
80	Pembekalan Barista	Masih Kurangnya Pengetahuan dan keterampilan		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	50 Unit	
81	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Belum adanya Rumah Ibadah (Hibah Uang)		KECAMATAN ANGGANA	1 Unit	
82	Pembangunan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Belum adanya Rumah Ibadah (Hibah Uang)		Handil Terusan, Sidomulyo, Kutai Lama, Sungai Mariam,Anggana	10 Unit	
83	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren (hibah uang)	Belum adanya Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren (Hibang Uang)		Kec. Anggana	15 Paket	
84	Penyediaan Alat Penunjang / Peraga (BKB Kit, BKB HI, BKL Kit, BKB Kit Stunting, BKR Kit, Kit Siap Nikah Anti Stunting)	masih minimnya alat penunjang		Desa Sungai Meriam,Desa Sidomulyo,Desa Anggana,Kutai Lama,Handil Terusan	30 Kelompok	

85	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Masih belum adanya biaya Operasinal nya		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	7 Paket	
86	Penyediaan Alat Kesenian	Masih minimnya Keterampilan dan Alat Kesenian		Kutai Lama SD N 10, SD N 06 ANGGANA, SD N 03 SEI MARIAM, SD N 015 MUARA PANTUAN, SD N 04 SUNGAI MARIAM, SDN 08 SIDOMULYO	26 ruang	
87	Pembangunan Ruang Kelas SD	Belum adanya ruang Kelas SD		SDN 0 3 SUNGAI MARIAM, SDN 04 SUNGAI MARIAM,SDN 08 SIDOMULYO, SDN 01 SUNGAI MARIAM, SDN 07 ANGGANA, SDN 10 KUTAI LAMA, SDN 011 HANDIL TERUSAN, SDN 017 SEPATIN	8 ruang	
88	Rehabilitasi Ruang Kelas SD	Belum adanya Rehabilitasi ruang Kelas SD		SDN 01 SUNGAI MARIAM, SDN 03 SUNGAI MARIAM, SDN 04 SUNGAI MARIAM, SDN 05 SUNGAI MARIAM, SDN 06 ANGGANA, SDN 07 ANGGANA, SDN 010 KUTAI LAMA, SDN 011 HANDIL TERUSAN, SDN 012 HANDIL TERUSAN, SDN 020 HANDIL TERUSAN, SDN 019 HANDIL TERUSAN, SDN 017 SEPATIN , SDN 015 MUARA PANTUAN, SDN 016	65 Unit	

				SEPATIN		
89	Pembangunan Toilet Siswa/Guru SD	Rusak Berat		SDN 05 SEI MARIAM,SDN 08 SIDOMULYO, SDN 018 KUTAI LAMA, SDN 011 HANTER, SDN 20 HANTER, SDN 019 HANTER	2 Unit	
90	Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara SD	Rusak Berat		SDN 002 SUNGAI MARIAM	2 Unit	
91	Pembangunan Rumah Dinas/Mess Guru SD	Rusak Berat		SMPN 1 ANGGANA, SMPN 2 KUTAI LAMA, SMPN 3 MUARA PANTUAN	33 Ruang	
92	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP	Rusak Berat		SMPN 5 SEPATIN, SMPN 6 SEPATIN	37 Unit	
93	Pembangunan UKS SMP	Rusak Berat		SMPN 3 MUARA PANTUAN, SMPN 5 SEPATIN,	26 ruang	
94	Pembangunan Laboratorum IPA/Komputer SMP	Rusak Berat		SMPN 2 KUTAI LAMA, SMPN 3 MUARA PANTUAN, SMPN 5 SEPATIN , SMPN 6 SEPATIN	26 unit	
95	Pembangunan Rumah Dinas/Mess Guru	Rusak Berat		SMPN 1 ANGGANA, SMPN 2 KUTAI LAMA, SMPN 3 MUARA PANTUAN,	28 unit	
96	Pembagunan Toilet SMP	Rusak Berat		SMPN 2 KUTAI LAMA	35 unit	
97	Semenisasi Halaman/Lapangan Upacara SMP	Halaman Masih Tanah		SMPN 1 ANGGANA, SMPN 2 KUTAI LAMA	3300 Meter	
98	Pembangunan Pagar SMP	Lanjutan Pembangunan Pagar		SMPN 3 MUARA PANTUAN, SMPN 4 TANI BARU, SMPN 5 SEPATIN, SMPN 6 SEPATIN,	1600 Meter	
99	Penurapan SMP	Rusak Berat		SMPN 1 ANGGANA, SMPN 3 MUARA PANTUAN, SMPN 5	24 ruang	

				SEPATIN		
100	Pembangunan Ruang Kantor SMP	Rusak Berat		SMPN 1 ANGGANA, SMPN 3 MUARA PANTUAN, SMPN 5 SEPATIN	32 ruang	
101	Rehabilitasi Ruang Kelas SMP	Rusak Berat		SMPN 1 ANGGANA, SMPN 6 SEPATIN	13 ruang	
102	Rehabilitasi Ruang Lab. IPA	Rusak Berat		SMPN 2 KUTAI LAMA, SMPN 4 TANI BARU,	15 ruang	
103	Rehabilitasi Ruang Kantor/ TU/ R. Guru/ R. Kepala Sekolah	Rusak Berat		SMPN 1 ANGGANA, SMPN 4 TANI BARU	12 Unit	
104	Rehabilitasi Musholla	Rusak Berat		SMPN 1 ANGGANA, SMPN 2 KUTAI LAMA, SMPN 3 MUARA PANTUAN	23 Unit	
105	Rehabilitasi Toilet/ WC/ Jamban	Rusak Berat		SMPN 4 TANI BARU	14 Unit	
106	Rehabilitasi Rumah Dinas/ Mess Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Rusak Berat		SMPN 1 ANGGANA, SMPN 2 KUTAI LAMA, SMPN 3 MUARA PANTUAN, SMPN 4 TANI BARU, SMPN 5 SEPATIN, SMPN 6 SEPATIN	102 Paket	
107	Pengadaan Meubelair SMP	Kurangnya Meubelair		SMPN 1 ANGGANA, SMPN 2 KUTAI LAMA, SMPN 3 MUARA PANTUAN, SMPN 4 TANI BARU, SMPN 5 SEPATIN, SMPN 6 SEPATIN	28 Paket	
108	Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SMP	Kurangnya Peralatan TIK		SMPN 1 ANGGANA, SMPN 2 KUTAI LAMA, SMPN 3 MUARA PANTUAN, SMPN 4 TANI BARU, SMPN 5 SEPATIN, SMPN 6	37 Paket	

				SEPATIN		
109	Pengadaan Media Pendidikan (seperti Globe, Peta, buku referensi, Papan Buletin, Papan Panel, dll)	Kurangnya Media Pendidikan		SMPN 1 ANGGANA, SMPN 2 KUTAI LAMA, SMPN 3 MUARA PANTUAN, SMPN 4 TANI BARU, SMPN 5 SEPATIN, SMPN 6 SEPATIN	24 Paket	
110	Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMP	Kurangnya Peralatan Lab		TK N 1 ANGGANA SUNGAI MARIAM, TK ISLAM MIFTAHUL ULUM SUNGAI MARIAM, KB AR RAHMAH SIDOMULYO, TK MELATI DESA HANTER	20 Ruang	
111	Pembangunan Ruang Kelas/Guru PAUD	Belum Adanya Mebel PAUD		TK ISLAM MIFTAHUL ULUM SUNGAI MARIAM, TK DAHLIA 4 SIDOMULYO, TK DAHLIA 5 KUTAI LAMA	12 Ruang	
112	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rusak Berat		LEMBAGA TK DAN PAUD SE KEC.ANGGANA	200 Unit	
113	Pengadaan Mebel PAUD (Pengadaan Meja kursi Guru, Meja kursi Siswa, Lemari rak buku, lemari file,)	Kurangnya Meubelair		LEMBAGA TK DAN PAUD SE KEC.ANGGANA	14 Paket	
114	Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE)Luar dan Dalam PAUD	Kurangnya Sarana prasarana Alat Permainan		Minimnya Pengetahuan tanggap bencana	250 orang	
115	Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR)	Minimnya Pengetahuan tanggap bencana		5 Kawasan prioritas Perkebunan dan Pertanian	3 Unit	
116	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terjadinya Penyumbatan saluran Drainase		Anggana, Sungai Mariam, Handil Terusan, Sidomulyo, Kutai Lama	35 Km	
117	Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir	Terjadinya Penyumbatan		Anggana, Sungai Mariam,	5 Unit	

		saluran Drainase		Handil Terusan, Sidomulyo, Kutai Lama		
118	Pemeliharaan Bangunan Chek Dam dan Saluran Check Dam Dengan Lebar Saluran Lebih Dari 4 Meter	Masih Rusaknya Akses Saluran Check Dam/irigasi		Anggana, Sungai Mariam, Handil Terusan, Sidomulyo, Kutai Lama	1,03 Km	
119	Pembangunan sistem drainase lingkungan (perkotaan)	Masih Rusaknya Akses sistem dranase lingkungan		Pembuatan Drainase Kecamatan	12 km	
120	Pembangunan sistem drainase lingkungan (perkotaan)	Masih Rusaknya Akses sistem dranase lingkungan		Drainase Jalan kanan kiri Jl.Poros Samarinda – Anggana	12 km	
121	Pembangunan sistem drainase lingkungan (perkotaan)	Masih Rusaknya Akses sistem dranase lingkungan		Anggana, Sungai Mariam, Handil Terusan, Sidomulyo, Kutai Lama	2,21 Km	
122	Operasi dan pemeliharaan sistem drainase (tambah kan detail lokasi/kriteria)	pemeliharaan/peraawatan yang dilakukan untuk menjamin berfungsinya saluran drainase/air dilingkungan perkotaan		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	20 orang	
123	Pelatihan Tenaga kerja konstruksi trampil	Masih Kurangnya Pengetahuan dan keterampilan		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	3 Unit	
124	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (kantor Desa/kelurahan, kantor Kecamatan,BPU Kecamatan)	Masih Rusaknya Akses Jalan		Anggana, Sungai Mariam, Handil Terusan, Sidomulyo, Kutai Lama	1 Unit	
125	Rehabilitasi Gedung Kantor Palayanan Publik (kantor Desa/kelurahan, kantor Kecamatan,BPU Kecamatan)	Kondisi gedung sudah kurang layak sehingga mengganggu pelayanan publik		Anggana, Sungai Mariam, Handil Terusan, Sidomulyo, Kutai Lama	33,50 % (6.704 unit dan 17.560 M2)	

126	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Rambu, Marka, ZOSS (Zona Selamat Sekolah) dan Paku Marka)	Kurang nya Fasilitas Lalu Lintas (Rambu,Marka,ZOSS(Zona Selamat Sekolah dan Paku Marka)		8 Desa Kecamatan Anggana	32,23 % (2.261 unit)	
127	Penyediaan perlengkapan Jalan (LPJU)	Kurangnya penerangan Jalan umum		muara pantuan, tani baru, sepatin, handil terusan, kutai lama, Sidomulyo	60 unit	
128	Pengadaan Mesin Pompa	Masih terbatasnya Mesin Pompa		muara pantuan, tani baru, sepatin, handil terusan, kutai lama, sungai mariam, anggana,	1000 SR	
129	Pengadaan Sambungan Rumah (SR)	Masih kurangnya Sambungan Rumah		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	300 unit	
130	Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK dan Tangkiseptick	Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana MCK dan Tangkiseptick		8 DESA KECAMATAN ANGGANA	300 unit	
131	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Rusaknya Jalan Lingkungan		Anggana, Sungai Mariam, Handil Terusan, Sidomulyo, Kutai Lama	257 13 lokasi	
132	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Belum adanya saluran drainase sehingga ketika terjadi hujan dengan intensitas berat akan membanjiri rumah warga			13	
133	Pembangunan Pusban	Sudah ada tapi tidak layak		Desa Sidomulyo	1 Unit	
134	Rehab Pusban	Belum ada Perbaikan		Desa Kutai Lama	1 Unit	

BAB III
TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran,maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan RencanaTata Ruang Wilayah(RTRW),RPJPD,RPJMD dan Renstra, sedang akan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025`

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka Rencana Kerja Kecamatan Anggana Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun propinsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategi yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yng selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima Tahun. Tujuan adalah pernyataan- pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahun. Kecamatan Anggana sebagai organisasi dalam memenuhi visi dan misi kecamatan telah dicapai dalam rangka mendukung pencapaian visi dam misi pembangunan. strategisnya dapat diukur, maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan disertai indikator kinerja *(performance indicator)* yang terukur.

Rumusan tujuan renja Kecamatan Anggana Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah (Kabupaten).

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Untuk selanjutnya dirumuskan Sasaran Renja Kecamatan Anggana Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Anggana.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan.
3. Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah kecamatan.

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

Tabel 4

Tujuan, sasaran dan indikator Kinerja sasaran

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)
1	2	3	4
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Diadministrasikan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Kecamatan Anggana Tahun 2025 disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kegiatan rutin kecamatan yang diusulkan dan terangkum dalam pelaksanaan musrembang tingkat kecamatan kemudian diusulkan pada musrenbang tingkat kabupaten yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Anggana pada Tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitasaparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahandesa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah dalam rangka pemberdayaanmasyarakat.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Anggana maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Anggana dengan demikan berikut ini yang tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel TC-33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kecamatan Anggana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	Kec.Anggana	7.173.658.017	APBD		70	7.401.238.037
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	Kec.Anggana	605.000.000,00	APBD		70	605.000.000,00
7.01.01.2.01.0009	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kec.Anggana	300.000.000,00	APBD		6 Dokumen	300.000.000,00
7.01.01.2.01.0010	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kec.Anggana	25.000.000,00	APBD		1 Dokumen	25.000.000,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kec.Anggana	140.000.000,00	APBD		2 Dokumen	140.000.000,00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kec.Anggana	5.000.000,00	APBD		1 Dokumen	5.000.000,00
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kec.Anggana	5.000.000,00	APBD		1 Dokumen	5.000.000,00
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD		Kec.Anggana	~~0,00~~	APBD			~~0,00~~

7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD		Kec.Anggana	0	APBD			0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kec.Anggana	70.000.000,00	APBD		2 Laporan	70.000.000,00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kec.Anggana	60.000.000,00	APBD		1 Laporan	60.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		Kec.Anggana	4.845.586.114	APBD			4.845.586.114
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	34 Orang/Bulan	Kec.Anggana	4.692.266.114,00	APBD		34 Orang/Bulan	4.692.266.114,00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	1 Laporan	Kec.Anggana	25.000.000,00	APBD		1 Laporan	25.000.000,00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	Kec.Anggana	103.320.000,00	APBD		2 Laporan	103.320.000,00
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan	1 Laporan	Kec.Anggana	25.000.000,00	APBD		1 Laporan	25.000.000,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	4 Laporan	Kec.Anggana	255.000.000,00	APBD		4 Laporan	255.000.000,00
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Kec.Anggana	25.000.000,00	APBD		1 Laporan	25.000.000,00

7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	1 Laporan	Kec.Anggana	150.000.000,00	APBD		1 Laporan	150.000.000,00
7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	1 Laporan	Kec.Anggana	50.000.000,00	APBD		1 Laporan	50.000.000,00
7.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			Kec.Anggana	0	APBD			0
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	1 Laporan	Kec.Anggana	30.000.000,00	APBD		1 Laporan	30.000.000,00
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kec.Anggana	-	APBD			-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian yang diadakan	1 Paket	Kec.Anggana	43.000.000,00	APBD		1 Paket	43.000.000,00
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			Kec.Anggana	0	APBD			0
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket	1 Paket	Kec.Anggana	43.000.000,00	APBD		1 Paket	43.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	Kec.Anggana	304.291.923,00	APBD		Jenis	304.291.923,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec.Anggana	0	APBD			0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	Kec.Anggana	97.216.986,00	APBD		1 Paket	97.216.986,00

7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kec.Anggana	0	APBD			0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	Kec.Anggana	34.088.000,00	APBD		1 Paket	34.088.000,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	Kec.Anggana	5.000.000,00	APBD		1 Paket	5.000.000,00
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kec.Anggana	0	APBD			0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	102 Laporan	Kec.Anggana	152.986.937,00	APBD		102 Laporan	152.986.937,00
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	500 Arsip	Kec.Anggana	15.000.000,00	APBD		500 Arsip	15.000.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara		Kec.Anggana	675.000.000,00	APBD			675.000.000,00
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kec.Anggana	0	APBD			0
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang diadakan	1 Unit	Kec.Anggana	180.000.000,00	APBD		1 Unit	180.000.000,00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel				0	APBD			0
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket	1 Paket	Kec.Anggana	50.000.000,00	APBD		1 Paket	50.000.000,00
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung	1 Gedung	Kec.Anggana	445.000.000,00	APBD		1 Gedung	445.000.000,00
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0	APBD			0

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	Kec.Anggana	370.579.980,00	APBD	Penambahan Pagu Anggaran	12 Bulan	598.160.000,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec.Anggana	0	APBD			0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Kec.Anggana	184.136.966,00	APBD	Penambahan Pagu Anggaran	12 Bulan	405.160.000,00
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0	APBD			0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Kec.Anggana	186.443.014,00	APBD	Penambahan Pagu Anggaran	12 Bulan	193.000.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	331 Unit	Kec.Anggana	75.200.000,00	APBD		331 Unit	75.200.000,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0	APBD			0
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	12 Unit	Kec.Anggana	25.200.000,00	APBD		12 Unit	25.200.000,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kec.Anggana	0	APBD			0
7.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			Kec.Anggana	0	APBD			0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 Gedun	Kec.Anggana	50.000.000,00	APBD		1 Gedung	50.000.000,00

			g						
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	Kec.Anggana	400.000.000,00	APBD		2 Kegiatan	400.000.000,00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Kegiatan	Kec.Anggana	150.000.000,00	APBD		1 Kegiatan	150.000.000,00
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	Kec.Anggana	250.000.000,00	APBD		1 Kegiatan	250.000.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	Kec.Anggana	100.000.000,00	APBD		1 Kegiatan	100.000.000,00

7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Kec.Anggana	0	APBD			0
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	Kec.Anggana	100.000.000,00	APBD		1 Kegiatan	100.000.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100%	Kec.Anggana	14.491.065.000,00	APBD		100%	14.491.065.000,00
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			Kec.Anggana	0	APBD			0
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan	1 Laporan	Kec.Anggana	741.065.000,00	APBD		1 Laporan	741.065.000,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan	3 Laporan	Kec.Anggana	13.750.000.000,00	APBD		3 Laporan	13.750.000.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa	8 Desa	Kec.Anggana	100.000.000,00	APBD		8 Desa	100.000.000,00
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta	150 Orang	Kec.Anggana	50.000.000,00	APBD		150 Orang	50.000.000,00
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			Kec.Anggana	0	APBD			0

7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	Kec.Anggana	50.000.000,00	APBD		1 Kegiatan	50.000.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Aktif yang diberdayakan	5 Lembaga	Kec.Anggana	486.000.000,00	APBD		5 Lembaga	486.000.000,00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	Kec.Anggana	486.000.000,00	APBD		1 Kegiatan	486.000.000,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	Kec.Anggana	175.000.000,00	APBD		1 Kegiatan	175.000.000,00
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	Kec.Anggana	175.000.000,00	APBD		1 Kegiatan	175.000.000,00
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100%	Kec.Anggana	185.000.000,00	APBD		100%	185.000.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	2 Kegiatan	Kec.Anggana	185.000.000,00	APBD		2 Kegiatan	185.000.000,00
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	Kec.Anggana	180.000.000,00	APBD		1 Kegiatan	180.000.000,00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	Kec.Anggana	5.000.000,00	APBD		1 Kegiatan	5.000.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan		Kec.Anggana		APBD			
7.01.06.2.01.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan	Jumlah Kegiatan		Kec.Angg	0	APBD			0

01	Desa dan Peraturan Kepala Desa			ana					
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Kegiatan		Kec.Anggana	~~0,00~~	APBD			~~0,00~~
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan		Kec.Anggana	0	APBD			0
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kegiatan		Kec.Anggana	0	APBD			0
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Kegiatan		Kec.Anggana	0	APBD			0
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan		Kec.Anggana	~~0,00~~	APBD			~~0,00~~
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan		Kec.Anggana	0	APBD			0
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Kegiatan		Kec.Anggana	0	APBD			0
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan		Kec.Anggana	0	APBD			0
Jumlah					23.110.723.017				23.338.303.037

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana strategis Kecamatan Anggana Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 Tahun.

. Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Anggana.

Rencana Kerja Kecamatan Anggana Tahun 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada Tahun 2025. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Anggana.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Kecamatan Anggana ini juga masih terdapat kekurang-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Kecamatan Anggana Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

yy.RENJA KECAMATAN SANGA SANGA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah didasari atas Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintah yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang di junjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan Good Governance yang memuat prinsip-prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Rule of Law Profesionalisme, Efektifitas dan Efisiensi. Dengan modal tersebut diharapkan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintah daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonomi karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan “ Kecamatan sebagimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah”. Jadi dapat

dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab Camat dalam mengemban tugas.Berdasarkan Rencana Strategis yang telah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) tahun yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi kepemerintahan Kecamatan Sangasanga untuk rentan waktu Tahun 2021 sampai dengan 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mewajibkan bagi setiap OPD untuk memiliki Rencana Kerja (RENJA – OPD) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud disusunyan Rencana Kerja Kecamatan Sangasanga Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakataan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Sangasanga guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Sangasanga Tahun 2025 adalah :

Sebagai masukan dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan.

Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan kesinergian antara pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya Kecamatan Sangasanga.

Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan.

Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat yang akan datang

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap kebijakan nasional dan provinsi
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sangasanga adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Peangkat daerah Kecamatan Sangasanga. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sangasanga ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Sangasanga selama tahun 2023 dan perkiraan tahun berjalan 2024.Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 sampai pelaksanaan kinerja Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan Perangkat Daerah dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), sebagaimana dijabarkan dalam table berikut ini :

TABELT-C29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama PD : Kecamatan Sangasanga

KODE				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra_x005fPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
								Target Renja -PD Tahun (2023)	Realisasi Renja -PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
X	XX	01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah								
X	XX	01.	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 dokumen	6 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	20 dokumen	67%
X	XX	01.	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	70 laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan	100%	14 laporan	42 laporan	60%

X	XX	01.	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	280	unit	56	unit	56	unit	45	unit	80%	56	unit	157	unit	56%
X	XX	01.	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	50	Layanan	10	Layanan	10	Layanan	10	Layanan	100%	10	Layanan	30	Layanan	60%
X	XX	01.	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	jenis	25	jenis	25	jenis	40	jenis	160%	25	jenis	90	jenis	90%
X	XX	01.	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	36	bulan	60%
X	XX	01.	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	152	unit	24	unit	32	unit	32	unit	100%	32	unit	88	unit	58%
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP														
					Tingkat Aksebilitas Wilayah Kecamatan														
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	5	SPM	1	SPM	1	SPM	1	SPM	100%	1	SPM	3	SPM	60%
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	20	Kegiatan	4	Kegiatan	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100%	4	Kegiatan	12	Kegiatan	60%

7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif										
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	20	Kali	20	Kali	0	Dok	0	Kali	#DIV/0!	20	Kali	40	Kali	200%
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	2845	Kegiatan	169	Kegiatan	305	Kegiatan	273	Kegiatan	90%	169	Kegiatan	611	Kegiatan	21%
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Lembaga Masyarakat	25	Kegiatan	5	Kegiatan	5	Dok	5	Kegiatan	100%	5	Kegiatan	15	Kegiatan	60%
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan										
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4	Kegiatan	0	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	1	Kegiatan	2	Kegiatan	50%
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum										
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16	Kegiatan	0	Kegiatan	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100%	4	Kegiatan	8	Kegiatan	50%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.2.1 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan;

Dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Utama pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sangasanga masih terdapat kendala-kendala, yang mana berimbas pada pelaksanaan program/kegiatan tidak memenuhi target yang direncanakan. Hal ini dapat dllihat pada Tabel 2.1.1

Tabel 2.1.1

Sesuai dengan Program / Kegiatan di DPA tahun 2023, berdasarkan Hasil Capaian Target Kinerja terdapat Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target 5 Kegiatan dibawah 100 %, sabagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

No	Program / Kegiatan	Target kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	56	45	80 %
2.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	305	273	90 %

2.2.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan:

Realisasi Program/kegiatan Kecamatan Sangasanga Tahun Anggaran 2023 yang memenuhi target kinerja 10 Kegiatan 100 %, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

No	Program / Kegiatan	Target kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	7	100%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14	14	100%
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10	10	100%
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	100%
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32	1	100%
6.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1	1	100%

7.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4	4	100%
8.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5	5	100%
9.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	1	100%
10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4	4	100%

2.2.3 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan;

Realisasi Program/kegiatan Kecamatan Sangasanga Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari 5 program 1 Kegiatan, terdapat program yang melebihi target kinerja.

No	Program / Kegiatan	Target kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25	40	160

2.2.4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan;

Tercapainya dan tidak tercapainya atau melebihi target kinerja program/kegiatan pada Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara disebabkan oleh :

Realisasi Program/Kegiatan pada Kecamatan Sangasanga Kabupaten Tahun Anggaran 2021 yang memenuhi target 100 % sebanyak 7 kegitan disebabkan realisasi anggaran sesuai dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran dan target yang telah ditetapkan .

Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target adalah sebanyak 3 kegiatan disebabkan antara lain :

a. Adanya 1 kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tidak memenuhi targer di sebapkan kan adanya kenaikan harga barang yang menyebapkan volume target jadi berkurang.

b. Adanya 1 kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tidak memenuhi targer di karena kan tidak adanya perbaikan / pemeliharaan printer dan mengakibat kan dana yang ada tidak terserap.

c. Adanya 1 kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang tidak memenuhi targer di karena kan adanya kegiatan yang tidak bias di laksanakan terkendala pandemic Covid -19.

Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target Anggaran yang direncanakan, Kecamatan Sangasanga tidak ada Program / Kegiatan yang melebihi target anggaran.

2.2.5 Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra Kecamatan Sangasanga

Implikasi yang timbul atas capaian program/kegiatan Rencana Strategis Kecamatan Sangasanga antara lain adalah:

a. Kecamatan Sangasanga dituntut untuk tetap melaksanakan fungsi dasarnya, yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan kecamatan;

b. Aparat Kecamatan dituntut bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;

c. Pola kerja di Kecamatan Sangasanga yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;

d. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;

e. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil Kecamatan Sangasanga;

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil oleh Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain:

1. Perencanaan program kegiatan Kecamatan Sangasanga secara konsisten mengacu pada Renstra Perangkat Daerah yang telah tersusun selama lima tahun anggaran kecuali ada kegiatan atau program yang sangat urgent dan perlu dilaksanakan pada tahun anggaran tertentu, dan proses perencanaan ini dituangkan dalam Rencana Kinerja (RENJA) Perangkat Daerah tiap tahun anggaran. Proses penyusunan perencanaan program/kegiatan tidak terlepas dari tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Sangasanga yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
2. Proses penganggaran program/kegiatan Perangkat Daerah diupayakan efesien, efektif, berpedoman pada regulasi-regulasi penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Sehingga kebutuhan anggaran untuk Program/kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD sesuai dengan kebutuhan kinerjanya.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sangasanga dalam pelaksanaannya, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan Paten Kecamatan Sangasanga tentang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan:
b. Melaksanakan pelayanan sesuai SOP;
c. Menugaskan petugas-petugas pelayanan yang lebih interaktif dan informatif serta ramah, sopan juga santun;
d. Mengupayakan pelayanan PATEN Kecamatan Sangasanga dengan berbasis Teknologi dan Informasi;

e. Menyediakan fasilitas sarana-sarana tempat untuk difabel, laktasi dan zona permainan edukatif;
f. Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
g. Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan untuk mendukung ZONA INTEGRITAS (ZI) dengan Pelayanan Bebas Pungli dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
h. Melaksanakan efesiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi kecamatan;dan
i. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan. Kecamatan adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Serta berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Disamping itu Camat juga berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Disamping itu pula Camat adalah merupakan perpanjangan tangan Bupati dalam pelaksanaan roda pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomo daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah

yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;

f. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan dan/atau Kelurahan;
g. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan oleh unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Susunan Organisasi Kantor Camat berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tanggal 24 Oktober 2016, terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretaris, membawahi:
    a. Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
    b. Sub Bagian Penyusun Program dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelurahan, membawahi
9. Sekretaris
10. Seksi Pemerintahan
11. Seksi Pembangunan
12. Seksi Sosial
13. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan kualitas SDM Kecamatan Sangasanga sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*, berikut pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Kecamatan Sangasanga dapat dilihat pada table:

TABEL T-C 30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SANGASANGA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Rentra - Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			60	70	80	90	100	100	100	100	100	
2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			60	70	80	90	100	100	100	100	100	
3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan			100	100	100	100	100	-	-	-	-	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Tingkat kinerja pelayanan OPD Kecamatan Sangasanga dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Sangasanga.

Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Sangasanga sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD kecamatan Sangasanga.

Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*).

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Tantangan:

Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (*Shof Weard – Hawaerd*) sehingga mempengarui kelancaran proses pelayanan;

Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan;

Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publi;

Peluang:

Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;

Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan;

Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran Pelayanan Paten Kecamatan Sangasanga;

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Sangasanga terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga. Kecamatan Sangasanga mengharapkan kepada Pemerintah agar terus melakukan pembinaan – pembinaan serta kompetisi dalam rangka memacu tumbuhnya bibit – bibit atlit yang berkualitas, sehingga mampu menambah kejuaraan dari tahun ke tahun, serta harus pula memberikan perhatian lebih kepada para pemuda berprestasi.

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Pada tahun anggaran 2024, OPD Kecamatan Sangasanga, melalui Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan melakukan penertiban, pembinaan, pemantau sehingga wilayah Kecamatan Sangasanga dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan porsonil, dan sarana prasaran yang mendukung.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana *tabel Review terhadap rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2025*

TABEL ; T-C 31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PAGU SIPD 2025	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PAGU SIPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.1.03.0.00.17.0000 KECAMATAN SANGASANGA				23.543.635.535	7.01.1.03.0.00.17.0000 KECAMATAN SANGASANGA				26.977.796.967	
7.01.1.03.0.00.17	Kecamatan Sanga Sanga				23.543.635.535	Kecamatan Sanga Sanga				19.277.796.967	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70 Nilai	10.539.670.448	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70 Nilai	12.012.780.967	
7.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	155.000.000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	605.000.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	140.000.000	Penambahan Pagu Penyusunan Dokumen Renstra dan Penyusunan Dokumen Renja - Perubahan
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 dokumen	0,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	Penambahan Pagu Penyusunan Dokumen RKA dan DPA-SKPD

7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	Pengurangan Pagu digeser ke sub Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 dokumen	0,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 dokumen	0,00	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 dokumen	0,00	Pengurangan Pagu enyusunan Perubahan DPA-SKPD
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	110.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	70.000.000	Pagu di sesuaikan kebutuhan Laporan Manajemen Resiko, Evaluasi Kinerja Triwulan (E-Pantau), LKJIP
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	60.000.000	Penambahan Pagu Evaluasi Renstra dan Renja
7.01.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	0,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	300.000.000	Penambahan Pagu Kecamatan sebagai pusat data (operasional Honorarium, Peralatan, pendampingan teknis) dan Pagu Satu Data (BECIK)

7.01.01.2.01.010	Pelaksanaan Forum PD Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	0 Berita Acara	0,00	Pelaksanaan Forum PD Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	2 Berita Acara	25.000.000	Penamabahan Pagu Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	14 laporan	8.109.224.920	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	14 laporan	9.172.496.735	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	714 orang	7.691.414.920	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	714 orang	8.708.596.735	Pagu Rekon
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	25.000.000	Penambahan Pagu Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	402.810.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	413.900.000	Penambahan Pagu sebesar 11,090,000,- Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kep	0 dokumen	0,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kep	1 dokumen	25.000.000	Penambahan Pagu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	50 unit	25.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	50 unit	255.000.000	
7.01.01.2.03.0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Kec. Sanga -	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	1 dokumen	10.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan	Kec. Sanga	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	1 dokumen	25.000.000	Penambahan Pagu sebesar Rt. 15,000,000,-

1	Daerah SKPD	Sanga	Milik Daerah SKPD			Barang Milik Daerah SKPD	- Sanga	Milik Daerah SKPD			Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 dokumen	0,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	150.000.000	Penambahan Pagu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	0,00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000.000	Penamabahan Pagu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000	Penamabahan Pagu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0,00	Pengurangan Pagu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	50 unit	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	50 unit	195.000.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Paket	0,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Paket	45.000.000	Penamabahan Pagu Pengadaan Baju PDH (Waskat ASN
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	66 Orang	150.000.000	Penamabahan Pagu Pelatihan RT dalam Proses Pembuatan SKPT
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	69 jenis	593.077.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	69 jenis	316.390.000	

7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.000.000	Penamabahan Pagu Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bola Lampu)
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	158.844.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	64.390.000	Pagu Sesuai Kebutuhan
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	92.953.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.000.000	Pagu Sesuai Kebutuhan
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0,00	Pagu Sesuai Kebutuhan
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	14.660.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0,00	Pagu Sesuai Kebutuhan
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173 Jumlah	260.120.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173 Jumlah	150.000.000	Pagu Sesuai Kebutuhan
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Pagu Sesuai Kebutuhan
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	21 Unit	140.664.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	21 Unit	-	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	140.664.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Pagu Pengadaan Kelurahan
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	1.193.563.528	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	1.139.984.232	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	239 Laporan	3.597.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Sanga -	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	239 Laporan	3.600.000	Pagu Sesuai Kebutuhan

							Sanga				
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	390.724.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	317.780.000	Pagu Sesuai Kebutuhan
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	799.242.028	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	818.604.232	Pagu Sesuai Kebutuhan
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	31 unit	323.141.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	31 unit	328.910.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	269.282.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	299.670.000,00	Pagu Sesuai Kebutuhan
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	21.200.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	29.240.000,00	Pagu Sesuai Kebutuhan
7.01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	32.659.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	0,00	Pagu Pengadaan Kelurahan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	15.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	550.000.000	
			Tingkat Aksebilitas Wilayah Kecamatan	100 Persen	6.000.000.000			Tingkat Aksebilitas Wilayah Kecamatan	100 Persen	1.933.616.000	

7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	1 Laporan	-	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	1 Laporan	450.000.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	0,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	150.000.000,00	Tambahan Pagu 1, FASILTASI KEGIATAN ERAU 2, STUNTING (REMBUK, OPERASIONAL TPPS KECAMATAN)
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	0,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	300.000.000,00	Penamabahan Pagu HUT RI Di Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	5 Kegiatan	15.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	5 Kegiatan	100.000.000	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15.000.000,00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0,00	Pengurangan Pagu Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	0 Laporan	0,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	100.000.000,00	Penamabahan Pagu Pramuka dan OPERASIONAL POKJANAL POSYANDU
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	5 Kegiatan	6.000.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	5 Kegiatan	1.933.616.000	

7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	14 Laporan	738.616.000,00	Penamabahan Pagu : 1, Pengelolaan Sampah Kecamatan 2, FASILITASI PATEN 3, PENANGANAN DARURAT BENCANA
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	35 Laporan	5.990.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7 Laporan	1.195.000.000,00	Pagu sesuai Kebutuhan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5 Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masy Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	6.310.860.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5 Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masya Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	3.756.400.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	5 Kali	-	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	5 Kali	-	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	-	Pagu Kelurahan
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	15 Kegiatan	3.935.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	15 Kegiatan	100.000.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kepmen 050 5889	5 Lembaga Kemasyarakatan	90.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kepmen 050 5889	5 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	Pagu Kecamatan dan Pagu Kelurahan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	370.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	-	Pagu Kelurahan
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	5 Pokmas / Ormas	3.475.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	5 Pokmas / Ormas	-	Pagu Kelurahan

			Masyarakat di Kelurahan					Masyarakat di Kelurahan			
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0 Laporan	-	Evaluasi Kelurahan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	50.000.000	Tambahan Pagu : 1, Fasilitasi Lomba Kelurahan dan Desa 2, Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	5 Kegiatan	2.375.860.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	5 Kegiatan	3.656.400.000	
7.01.03.2.03.02	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1038 Lembaga Kemasyarakatan	2.375.860.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1038 Lembaga Kemasyarakatan	3.656.400.000	Penamabahan Pagu Kelembagaan berdasarkan kebutuhan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel Yang Aktif	100 Persen	50.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel Yang Aktif	100 Persen	175.000.000	
7.01.04.2.01			Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	50.000.000			Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	175.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	50.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0 Laporan	-	Pengurangan Pagu Kegiatan pindah ke sub kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0 Laporan	0,00	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	175.000.000	Penamabahan Pagu : 1, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 2, Safari Ramadhan

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masy di wilayah Kecamatan	100 Persen	628.105.087	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masy di wilayah Kecamatan	100 Persen	850.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	4 Kegiatan	628.105.087	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	4 Kegiatan	850.000.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1500 Orang	528.105.087	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0 Orang	0,00	Pengurangan Pagu di geser ke sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	50.000.000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1500 Orang	800.000.000	Penambahan Pagu di ambil dari Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	50.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Sanga - Sanga	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	50.000.000	Penamabahan Pagu Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

7.01.1.03.0.00.17.0001	KELURAHAN JAWA	Kel. Jawa			-	KELURAHAN JAWA	Kel. Jawa			1.330.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kel. Jawa	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0 Nilai	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kel. Jawa	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70 Nilai	130.000.000	
7.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kel. Jawa	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kel. Jawa	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		14.520.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Jawa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 laporan	0,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Jawa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	14.520.000	Pagu Rutin Kelurahan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Jawa	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Jawa	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah		93.176.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Jawa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Jawa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.226.000	Pagu Rutin Kelurahan
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Jawa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Jawa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.750.000	Pagu Rutin Kelurahan
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Jawa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Jawa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	46.200.000	Pagu Rutin Kelurahan
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kel. Jawa	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kel. Jawa	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		22.304.000	

7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Jawa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Jawa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	22.304.000	Pagu Rutin Kelurahan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Jawa	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	0 Persen	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Jawa	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	1.200.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Jawa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	0 Kegiatan	-	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Jawa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	15 Kegiatan	750.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Jawa	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Jawa	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	450.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Jawa	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Jawa	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.03.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	0 Kegiatan	-	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	5 Kegiatan	450.000.000	
7.01.03.2.03.02	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Jawa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	450.000.000	Pagu Sesuai Kebutuhan
7.01.1.03.0.00.17.0002	KELURAHAN PENDINGIN	Kel. Pendingin			-	KELURAHAN PENDINGIN	Kel. Pendingin			1.480.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kel. Pendingin	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0 Nilai	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kel. Pendingin	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70 Nilai	130.000.000	
7.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kel. Pendin	Jumlah laporan Administrasi Keuangan		-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kel. Pendin	Jumlah laporan Administrasi Keuangan		12.120.0	

		gin	Perangkat Daerah yang akuntabel				gin	Perangkat Daerah yang akuntabel		00	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Pendingin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 laporan	0,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Pendingin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12.120.000	Pagu Rutin Kelurahan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Pendingin	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Pendingin	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah		66.698.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Pendingin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Pendingin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.483.000	Pagu Rutin Kelurahan
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Pendingin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Pendingin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.925.000	Pagu Rutin Kelurahan
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Pendingin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Pendingin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	33.290.000	Pagu Rutin Kelurahan
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kel. Pendingin	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kel. Pendingin	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		46.552.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Pendingin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Pendingin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	46.552.000	Pagu Rutin Kelurahan
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Pendingin	Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Pendingin	Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah		4.630.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Pendingin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Pendingin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	4.630.000	Pagu Rutin Kelurahan

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Pendingin	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	0 Persen	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Pendingin	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	1.350.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Pendingin	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	0 Kegiatan	-	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Pendingin	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	15 Kegiatan	750.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Pendingin	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Pendingin	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	450.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Pendingin	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Pendingin	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelur	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.03.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Pendingin	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	0 Kegiatan	-	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Pendingin	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	5 Kegiatan	600.000.000	
7.01.03.2.03.02	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Pendingin	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kepmen 050 5889	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Pendingin	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kepmen 050 5889	12 Lembaga Kemasyarakatan	600.000.000	Pagu Dedikasi RT 50,000,000,-
7.01.1.03.0.00.17.0003	KELURAHAN SANGASANGA DALAM	Kel. Sangasanga Dalam			-	KELURAHAN SANGASANGA DALAM	Kel. Sangasanga Dalam			2.080.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kel. Sangasanga Dalam	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0 Nilai	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kel. Sangasanga Dalam	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70 Nilai	130.000.000	
7.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		10.100.000	

7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 laporan	0,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 laporan	10.100.000	Pagu Rutin Kelurahan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah		71.331.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.959.000	Pagu Rutin Kelurahan
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.792.000	Pagu Rutin Kelurahan
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	41.580.000	Pagu Rutin Kelurahan
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		48.569.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	48.569.000	Pagu Rutin Kelurahan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Sangasanga Dalam	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	0 Persen	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Sangasanga Dalam	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	1.950.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Sangasanga	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	0 Kegiatan	-	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Sangasanga	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	15 Kegiatan	750.000.000	

		Dalam					Dalam				
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	450.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.03.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	5 Kegiatan	-	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	5 Kegiatan	1.200.000.000	
7.01.03.2.03.02	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kepmen 050 5889	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Sangasanga Dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kepmen 050 5889	24 Lembaga Kemasyarakatan	1.200.000.000	Pagu Dedikasi RT 50,000,000,-
7.01.1.03.0.00.17.0004	KELURAHAN SANGASANGA MUARA	Kel. Sangasanga Muara			-	KELURAHAN SANGASANGA MUARA	Kel. Sangasanga Muara			1.430.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kel. Sangasanga Muara	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0 Nilai	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kel. Sangasanga Muara	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70 Nilai	130.000.000	
7.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		12.120.000	

7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 laporan	0,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12.120.000	Pagu Rutin Kelurahan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah		65.174.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.704.000	Pagu Rutin Kelurahan
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.050.000	Pagu Rutin Kelurahan
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 laporan	0,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46 laporan	35.420.000	Pagu Rutin Kelurahan
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		52.706.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	52.706.000	Pagu Rutin Kelurahan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Sangasanga Muara	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	0 Persen	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Sangasanga Muara	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	1.300.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Sangasanga	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	0 Kegiatan	-	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Sangasanga	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	15 Kegiatan	750.000.000	

		Muara					Muara				
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	450.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.03.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	5 Kegiatan	-	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	5 Kegiatan	550.000.000	
7.01.03.2.03.02	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Sangasanga Muara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Lembaga Kemasyarakatan	550.000.000	Pagu Dedikasi RT 50,000,000,-
7.01.1.03.0.00.17.0005	KELURAHAN SARIJAYA	Kel. Sarijaya			-	KELURAHAN SARIJAYA	Kel. Sarijaya			1.380.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kel. Sarijaya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0 Nilai	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kel. Sarijaya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70 Nilai	130.000.000	
7.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kel. Sarijaya	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kel. Sarijaya	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		12.120.000	

7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Sarijaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 laporan	0,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Sarijaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12.120.000	Pagu Rutin Kelurahan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Sarijaya	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Sarijaya	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah		70.555.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Sarijaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Sarijaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.975.000	Pagu Rutin Kelurahan
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Sarijaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Sarijaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.920.000	Pagu Rutin Kelurahan
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Sarijaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 laporan	0,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Sarijaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	44.660.000	Pagu Rutin Kelurahan
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kel. Sarijaya	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kel. Sarijaya	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		47.325.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Sarijaya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Sarijaya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	47.325.000	Pagu Rutin Kelurahan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Sarijaya	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel Yang Aktif	0 Persen	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Sarijaya	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel Yang Aktif	100 Persen	1.250.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Sarijaya	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	0 Kegiatan	-	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Sarijaya	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	15 Kegiatan	750.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Sarijaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Sarijaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	450.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Sarijaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Sarijaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.03.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Sarijaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	5 Kegiatan	-	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Sarijaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	5 Kegiatan	500.000.000	
7.01.03.2.03.02	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Sarijaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kepmen 050 5889	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Sarijaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kepmen 050 5889	10 Lembaga Kemasyarakatan	500.000.000	Pagu Dedikasi RT 50,000,000,-

Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat (prosesdur *Baten Up*).

Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program – program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk di dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Kemasyarakatan, LPM, Karang Taruna, KPM, RT, sehingga mengahislkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbang.

Di Form Musrenbang menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing OPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Berikut adalah *Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025.*

TABEL ; T-C 32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SANGASANGA

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	10	11	12
1.	Pembuatan Jalan Jembatan Gg.Damai RT 07 Kel. Sangasanga Muara	Sanga-Sanga Muara	Panjang Jalan yang di Bangun	150 Meter	200.000.000,-	MUSRENBANG
2.	SEMENISASI GANG PAPADAAN RT. 08 Pendingin	Pendingin	Panjang Jalan yang di Bangun	200 Meter	100.000.000,-	MUSRENBANG

3.	SEMENISASI GANG ATOM RT. 09 PENDINGIN	Pendingin	Panjang Turap	150 Meter	145.000.000,-	MUSRENBANG
4.	SEMENISASI GANG KERABAT RT. 012 PENDINGIN	Pendingin	Panjang Jalan yang di Bangun	200 Meter	100.000.000,-	MUSRENBANG
5.	SEMENISASI GANG KABUL RT. 013 PENDINGIN	Pendingin	Panjang Jalan yang di Bangun	200 Meter	100.000.000,-	MUSRENBANG
6.	Turap Ulin RT. 16 Kel. Sangasanga Dalam	Sanga-Sanga Dalam	Panjang Jalan yang di Bangun	200 Meter	200.000.000,-	MUSRENBANG
7.	Semenisasi Halaman Depan Gedung Sekretariat Satu Data dan Record Center Kantor Camat Sangasanga	Sanga Sanga	Panjang Jalan yang di Bangun	150 Meter	200.000.000,-	MUSRENBANG
8.	Pembuatan Drainase (888462)	Sanga-Sanga Dalam	Panjang Drainase yang di Bangun	150 Meter	150.000.000,-	MUSRENBANG
TOTAL					5.990.000.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2024 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Sangasanga 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja-PD

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, dengan Misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program – program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang sesuai Visi yang telah ditetapkan tersebut. Kecamatan Sangasanga mempunyai Misi sebagai berikut:

VISI MISI KUKAR IDAMAN
2021 - 2026

VISI

Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia

SEJAHTERA adalah kondisi masyarakat kutai kartanegara yang mudah mengakses hak hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan

BERBAHAGIA adalah kondisi masyarakat kutai kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketentraman, diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian dan gotong royong, belandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

MISI

1. MEMANTAPKAN BIROKRASI YANG BERSIH, EFEKTIF, EFESIEN DAN MELAYANI;
2. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA, UNGGUL DAN BERBUDAYA;
3. MEMPERKUAT PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF;
4. MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH;
5. MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN.

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sangasanga adalah Misi ke-1 yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani. kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Sangasanga Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

VISI :				
"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"				
MISI	TUJUAN		SASARAN	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti
				Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan

Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan Kecamatan Sangasanga dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka Tujuan yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sangasanga adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel.

Sasaran

Berdasarkan pada Tujuan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Sangasanga, maka Sasaran yang hendak dicapai terlihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3. 2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sangasanga Tahun 2021-2026

					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	60	70	80	90	100
			Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	60	70	80	90	100
			Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	100	100	100	100	100

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan perangkat daerah merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Adapun strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sangasanga Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. 2. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sangasanga

VISI (RPJMD)	: "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"			
MISI (RPJMD)*	: 1, Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;			
Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik Kecamatan	1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
				3. Meningkatkan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
				4. Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		2	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				2. Meningkatkan Pemberdayaan Kelurahan
		3	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				2. Meningkatkan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		4	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		5	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

		6	Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan	Meningkatkan fasilitas penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Sangasanga merupakan salah satu Perangkat Daerah Kab. Kutai Kartanegara PD sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Sangasanga sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan Pelayanan Umum.

4.2 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

   Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Sangasanga diarahkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Sangasanga merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara nantinya.

b. Pencapaian SDGs

   Sustainable Development Golds merupakan sebuah program pembangunan berkelajutan dimana kesepakan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menanda tangani SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menanda tangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target SGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Sangasanga diimplentasikan untuk mencapai target-target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

c. Pengetasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius.

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kab. Kutai Kartanegara. Demikian pula halnya dengan Penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sangasanga. Program dan kegitan yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

d. Pencapaian SPM

Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Sangasanga diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Pelayanan Administrasi Kantor dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.

e. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Sangasanga sebagai sebuah Kecamatan di Kab. Kutai Kartanegara memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kab. Kutai Kartanegara. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil berupa UKM (Usaha Kecil Menengah), dibidang peternakan, perikanan, pertanian obyek-obyek pariwisata kota juang dan migas. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Sangasanga melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Sangasanga Tahun 2025 adalah 5 Program dengan 13 Kegiatan.

Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Sangasanga sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Sangasanga dan melingkupi semua Kelurahan.

Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.

Untuk Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada table berikut.

TABEL ; T-C 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025

DAN PRAKIRAAN MAJU PADA TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SANGASANGA

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	PAGU SIPD 2025	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.1.03.0.00.17.0000 KECAMATAN SANGASANGA				26.977.796.967				23.543.635.535
7.01.1.03.0.00.17	Kecamatan Sanga Sanga				19.277.796.967				23.543.635.535
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		70 Nilai	12.012.780.967			70 Nilai	10.539.670.448
7.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7 dokumen	605.000.000			7 dokumen	155.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sanga - Sanga	3 dokumen	140.000.000	APBD	Penambahan Pagu Penyusunan Dokumen Renstra dan Penyusunan Dokumen Renja - Perubahan	3 dokumen	25.000.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Sanga - Sanga	1 dokumen	5.000.000	APBD	Penambahan Pagu Penyusunan Dokumen RKA dan DPA-SKPD	0 dokumen	0,00
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	Kec. Sanga - Sanga	1 dokumen	5.000.000	APBD	Pengurangan Pagu digeser ke sub Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	10.000.000

7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Sanga - Sanga	0 dokumen	0,00			0 dokumen	0,00
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Sanga - Sanga	0 dokumen	0,00		Pengurangan Pagu enyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	10.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sanga - Sanga	12 laporan	70.000.000	APBD	Pagu di sesuaikan kebutuhan Laporan Manajemen Resiko, Evaluasi Kinerja Triwulan (E-Pantau), LKJIP	12 laporan	110.000.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sanga - Sanga	2 Laporan	60.000.000	APBD	Penambahan Pagu Evaluasi Renstra dan Renja	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kec. Sanga - Sanga	2 Data	300.000.000	APBD	Penambahan Pagu Kecamatan sebagai pusat data (operasional Honorarium, Peralatan, pendampingan teknis) dan Pagu Satu Data (BECIK)	0 Data	0,00
7.01.01.2.01.010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah K	Kec. Sanga - Sanga	2 Berita Acara	25.000.000	APBD	Penamabahan Pagu Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)	0 Berita Acara	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		14 laporan	9.172.496.735			14 laporan	8.109.224.920
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sanga - Sanga	714 orang	8.708.596.735		Pagu Rekon	714 orang	7.691.414.920
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Sanga - Sanga	2 laporan	25.000.000		Penambahan Pagu Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	15.000.000

7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Sanga - Sanga	12 Laporan	413.900.000		Penambahan Pagu sebesar 11,090,000,- Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	402.810.000
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kep	Kec. Sanga - Sanga	1 dokumen	25.000.000		Penambahan Pagu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan		50 unit	255.000.000			50 unit	25.000.000
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Sanga - Sanga	1 dokumen	25.000.000	APBD	Penambahan Pagu sebesar Rt. 15,000,000,- Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	10.000.000
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Sanga - Sanga	1 dokumen	150.000.000	APBD	Penambahan Pagu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 dokumen	0,00
7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Sanga - Sanga	1 Laporan	50.000.000	APBD	Penamabahan Pagu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Sanga - Sanga	1 Laporan	30.000.000	APBD	Penamabahan Pagu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Sanga - Sanga	0 Laporan	0,00		Pengurangan Pagu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan		50 unit	195.000.000			50 unit	-
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sanga - Sanga	1 Paket	45.000.000	APBD	Penamabahan Pagu Pengadaan Baju PDH (Waskat ASN	Paket	0,00
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-	Kec. Sanga - Sanga	66 Orang	150.000.000	APBD	Penamabahan Pagu Pelatihan RT dalam Proses Pembuatan SKPT	Orang	0,00

		Undangan							
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		69 jenis	316.390.000			69 jenis	593.077.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Sanga - Sanga	1 Paket	7.000.000	APBD	Penamabahan Pagu Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bola Lampu)	1 Paket	4.500.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Kelurahan	1 Paket	64.390.000	APBD	Pagu Sesuai Kebutuhan	1 Paket	158.844.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Kelurahan	1 Paket	45.000.000	APBD	Pagu Sesuai Kebutuhan	1 Paket	92.953.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	0 Paket	0,00		Pagu Sesuai Kebutuhan	1 Paket	12.000.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	0 Laporan	0,00		Pagu Sesuai Kebutuhan	1 Laporan	14.660.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Kelurahan	173 Jumlah	150.000.000	APBD	Pagu Sesuai Kebutuhan	173 Jumlah	260.120.000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Sanga - Sanga	1 Dokumen	50.000.000	APBD	Pagu Sesuai Kebutuhan	1 Dokumen	50.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		21 Unit	-			21 Unit	140.664.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Kelurahan	0 Unit	-		Pagu Pengadaan Kelurahan	21 Unit	140.664.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 bulan	1.139.984.232			12 bulan	1.193.563.528
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Sanga - Sanga	239 Laporan	3.600.000	APBD	Pagu Sesuai Kebutuhan	239 Laporan	3.597.000

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Sanga - Sanga	12 Laporan	317.780.000	APBD	Pagu Sesuai Kebutuhan	12 Laporan	390.724.500
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Sanga - Sanga	12 Laporan	818.604.232	APBD	Pagu Sesuai Kebutuhan	12 Laporan	799.242.028
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		31 unit	328.910.000			31 unit	323.141.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Sanga - Sanga	8 Unit	299.670.000,00	APBD	Pagu Sesuai Kebutuhan	8 Unit	269.282.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Sanga - Sanga	10 unit	29.240.000,00	APBD	Pagu Sesuai Kebutuhan	10 unit	21.200.000
7.01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Sanga - Sanga	0 unit	0,00		Pagu Pengadaan Kelurahan	3	32.659.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP		100 Persen	550.000.000			100 Persen	15.000.000
		Tingkat Aksebilitas Wilayah Kecamatan		100 Persen	1.933.616.000			100 Persen	6.000.000.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi		1 Laporan	450.000.000			1 Laporan	-
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sanga - Sanga	2 Laporan	150.000.000,00	APBD	Tambahan Pagu 1, FASILTASI KEGIATAN ERAU 2, STUNTING (REMBUK, OPERASIONAL TPPS KECAMATAN)	0 Laporan	0,00

7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sanga - Sanga	1 Dokumen	300.000.000,00	APBD	Penamabahan Pagu HUT RI Di Kecamatan	0 Dokumen	0,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat		5 Kegiatan	100.000.000			5 Kegiatan	15.000.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sanga - Sanga	0 Laporan	0,00		Pengurangan Pagu Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15.000.000,00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec. Sanga - Sanga	2 Laporan	100.000.000,00	APBD	Penamabahan Pagu Pramuka dan OPERASIONAL POKJANAL POSYANDU	0 Laporan	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat		5 Kegiatan	1.933.616.000			5 Kegiatan	6.000.000.000
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec. Sanga - Sanga	14 Laporan	738.616.000,00	APBD	Penamabahan Pagu : 1, Pengelolaan Sampah Kecamatan 2, FASILITASI PATEN 3, PENANGANAN DARURAT BENCANA	1 Laporan	10.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sanga - Sanga	7 Laporan	1.195.000.000,00	APBD	Pagu sesuai Kebutuhan	35 Laporan	5.990.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	5 Kelurahan	100 Persen	3.756.400.000			100 Persen	6.310.860.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan		5 Kali	-			5 Kali	-

7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Kelurahan	0 Laporan	-		Pagu Kelurahan	0 Laporan	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan		15 Kegiatan	100.000.000			15 Kegiatan	3.935.000.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kepmen 050 5889	Kec. Sanga - Sanga	5 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	APBD	Pagu Kecamatan dan Pagu Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	90.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Kelurahan	5 Unit	-		Pagu Kelurahan	5 Unit	370.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	-		Pagu Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	3.475.000.000
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kec. Sanga - Sanga	2 Laporan	50.000.000	APBD	Tambahan Pagu : 1, Fasilitasi Lomba Kelurahan dan Desa 2, Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	0 Laporan	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan		5 Kegiatan	3.656.400.000			5 Kegiatan	2.375.860.000
7.01.03.2.03.02	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Sanga - Sanga	1038 Lembaga Kemasyarakatan	3.656.400.000	APBD	Penamabahan Pagu Kelembagaan berdasarkan kebutuhan	1038 Lembaga Kemasyarakatan	2.375.860.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif		100 Persen	175.000.000			100 Persen	50.000.000
7.01.04.2.01		Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1 Kegiatan	175.000.000			1 Kegiatan	50.000.000

7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sanga - Sanga	0 Laporan	-		Pengurangan Pagu Kegiatan pindah ke sub kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	50.000.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Sanga - Sanga	2 Laporan	175.000.000	APBD	Penamabahan Pagu : 1, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 2, Safari Ramadhan	0 Laporan	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan		100 Persen	850.000.000			100 Persen	628.105.087
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan		4 Kegiatan	850.000.000			4 Kegiatan	628.105.087
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Sanga - Sanga	0 Orang	0,00		Pengurangan Pagu di geser ke sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1500 Orang	528.105.087
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Sanga - Sanga	1500 Orang	800.000.000	APBD	Penambahan Pagu di ambil dari Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	50.000.000

7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Sanga - Sanga	1 Dokumen	50.000.000	APBD	Penamabahan Pagu Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	50.000.000
7.01.1.03.0.00.17.0001	KELURAHAN JAWA		Kel. Jawa		1.330.000.000				-
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kel. Jawa	70 Nilai	130.000.000			0 Nilai	-
7.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Kel. Jawa		14.520.000				-
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Jawa	12 laporan	14.520.000	APBD	Pagu Rutin Kelurahan	0 laporan	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Jawa		93.176.000				-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kel. Jawa	1 Paket	30.226.000	APBD	Pagu Rutin Kelurahan	0 Paket	0,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kel. Jawa	1 Paket	16.750.000	APBD	Pagu Rutin Kelurahan	0 Paket	0,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Jawa	40 Laporan	46.200.000	APBD	Pagu Rutin Kelurahan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Kel. Jawa		22.304.000				-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kel. Jawa	5 Unit	22.304.000	APBD	Pagu Rutin Kelurahan	0 Unit	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Kel. Jawa	100 Persen	1.200.000.000			0 Persen	-

7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kel. Jawa	15 Kegiatan	750.000.000			0 Kegiatan	-
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel. Jawa	3 Unit	450.000.000	APBD	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0 Unit	0,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Jawa	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	APBD	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0,00
7.01.03.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kel. Jawa	5 Kegiatan	450.000.000			0 Kegiatan	-
7.01.03.2.03.02	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Jawa	9 Lembaga Kemasyarakatan	450.000.000		Pagu Sesuai Kebutuhan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00
7.01.1.03.0.00.17.0002	KELURAHAN PENDINGIN		Kel. Pendingin		1.480.000.000				-
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kel. Pendingin	70 Nilai	130.000.000			0 Nilai	-
7.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Kel. Pendingin		12.120.000				-
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Pendingin	12 laporan	12.120.000	APBD	Pagu Rutin Kelurahan	0 laporan	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Pendingin		66.698.000				-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kel. Pendingin	1 Paket	20.483.000	APBD	Pagu Rutin Kelurahan	0 Paket	0,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kel. Pendingin	1 Paket	12.925.000	APBD	Pagu Rutin Kelurahan	0 Paket	0,00

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Pendingin	35 Laporan	33.290.000	APBD	Pagu Rutin Kelurahan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Kel. Pendingin		46.552.000				-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kel. Pendingin	6 Unit	46.552.000	APBD	Pagu Rutin Kelurahan	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Pendingin		4.630.000				-
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kel. Pendingin	5 Unit	4.630.000	APBD	Pagu Rutin Kelurahan	0 Unit	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Kel. Pendingin	100 Persen	1.350.000.000			0 Persen	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kel. Pendingin	15 Kegiatan	750.000.000			0 Kegiatan	-
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel. Pendingin	5 Unit	450.000.000	APBD	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0 Unit	0,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Pendingin	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	APBD	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0,00
7.01.03.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kel. Pendingin	5 Kegiatan	600.000.000			0 Kegiatan	-
7.01.03.2.03.02	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kepmen 050 5889	Kel. Pendingin	12 Lembaga Kemasyarakatan	600.000.000	APBD	Pagu Dedikasi RT 50,000,000,-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00
7.01.1.03.0.00.17.0003	KELURAHAN SANGASANGA DALAM		Kel. Sangasanga Dalam		2.080.000.000				-

7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kel. Sangasanga Dalam	70 Nilai	130.000.000			0 Nilai	-
7.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Kel. Sangasanga Dalam		10.100.000				-
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Sangasanga Dalam	10 laporan	10.100.000	APBD	Pagu Rutin Kelurahan	0 laporan	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Sangasanga Dalam		71.331.000				-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kel. Sangasanga Dalam	1 Paket	19.959.000	APBD	Pagu Rutin Kelurahan	0 Paket	0,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kel. Sangasanga Dalam	1 Paket	9.792.000	APBD	Pagu Rutin Kelurahan	0 Paket	0,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Sangasanga Dalam	35 Laporan	41.580.000	APBD	Pagu Rutin Kelurahan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan			48.569.000				-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kel. Sangasanga Dalam	6 Unit	48.569.000	APBD	Pagu Rutin Kelurahan	0 Unit	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Kel. Sangasanga Dalam	100 Persen	1.950.000.000			0 Persen	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kel. Sangasanga Dalam	15 Kegiatan	750.000.000			0 Kegiatan	-

7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel. Sangasanga Dalam	5 Unit	450.000.000	APBD	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0 Unit	0,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Sangasanga Dalam	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	APBD	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0,00
7.01.03.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kel. Sangasanga Dalam	5 Kegiatan	1.200.000.000			5 Kegiatan	-
7.01.03.2.03.02	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kepmen 050 5889	Kel. Sangasanga Dalam	24 Lembaga Kemasyarakatan	1.200.000.000	APBD	Pagu Dedikasi RT 50,000,000,-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00
7.01.1.03.0.00.17.0004	KELURAHAN SANGASANGA MUARA		Kel. Sangasanga Muara		1.430.000.000				-
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kel. Sangasanga Muara	70 Nilai	130.000.000			0 Nilai	-
7.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Kel. Sangasanga Muara		12.120.000				-
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Sangasanga Muara	12 laporan	12.120.000	APBD	Pagu Rutin Kelurahan	0 laporan	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Sangasanga Muara		65.174.000				-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kel. Sangasanga Muara	1 Paket	19.704.000	APBD	Pagu Rutin Kelurahan	0 Paket	0,00

7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kel. Sangasanga Muara	1 Paket	10.050.000	APBD	Pagu Rutin Kelurahan	0 Paket	0,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultas SKPD	Kel. Sangasanga Muara	46 laporan	35.420.000	APBD	Pagu Rutin Kelurahan	0 laporan	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Kel. Sangasanga Muara		52.706.000				-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kel. Sangasanga Muara	7 Unit	52.706.000	APBD	Pagu Rutin Kelurahan	0 Unit	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Kel. Sangasanga Muara	100 Persen	1.300.000.000			0 Persen	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kel. Sangasanga Muara	15 Kegiatan	750.000.000			0 Kegiatan	-
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel. Sangasanga Muara	5 Unit	450.000.000	APBD	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0 Unit	0,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Sangasanga Muara	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	APBD	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0,00
7.01.03.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kel. Sangasanga Muara	5 Kegiatan	550.000.000			5 Kegiatan	-
7.01.03.2.03.02	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Sangasanga Muara	11 Lembaga Kemasyarakatan	550.000.000	APBD	Pagu Dedikasi RT 50,000,000,-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00
7.01.1.03.0.00.17.0005	KELURAHAN SARIJAYA		Kel. Sarijaya		1.380.000.000				-
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kel. Sarijaya	70 Nilai	130.000.000			0 Nilai	-

	KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Kel. Sarijaya		12.120.000				-
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Sarijaya	12 laporan	12.120.000	APBD	Pagu Rutin Kelurahan	0 laporan	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Sarijaya		70.555.000				-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kel. Sarijaya	1 Paket	17.975.000	APBD	Pagu Rutin Kelurahan	0 Paket	0,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kel. Sarijaya	1 Paket	7.920.000	APBD	Pagu Rutin Kelurahan	0 Paket	0,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Sarijaya	50 laporan	44.660.000	APBD	Pagu Rutin Kelurahan	0 laporan	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Kel. Sarijaya		47.325.000				-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kel. Sarijaya	5 Unit	47.325.000	APBD	Pagu Rutin Kelurahan	0 Unit	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Kel. Sarijaya	100 Persen	1.250.000.000			0 Persen	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kel. Sarijaya	15 Kegiatan	750.000.000			0 Kegiatan	-
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel. Sarijaya	5 Unit	450.000.000	APBD	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0 Unit	0,00

7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Sarijaya	5 Pokmas / Ormas	300.000.000	APBD	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0,00
7.01.03.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kel. Sarijaya	5 Kegiatan	500.000.000			5 Kegiatan	-
7.01.03.2.03.02	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kepmen 050 5889	Kel. Sarijaya	10 Lembaga Kemasyarakatan	500.000.000	APBD	Pagu Dedikasi RT 50,000,000,-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00

BAB V
PENUTUP

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, OPD Kecamatan Sangasanga sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan OPD Kecamatan Sangasanga merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotesme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya. Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui APBDP tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

A. Kaida – kaidah pelaksanaan

program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja OPD Kecamatan Sangasanga dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

Kecamatan Sangasanga berkewajiban untuk mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sangasanga Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RPJMD Kab. Kutai Kartanega Tahun 2021-2026.

Kecamatan Sangasa Sanga berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Sangasanga Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Sangasanga Tahun 2024 dan RPJMD Kab. Kutai Kartanega Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Kecamatan Sangasanga Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas

pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun yang bersumber dari APBD Propinsi.

B. Rencana tindak lanjut

OPD Kecamatan Sangasanga pada tahun 2025 mendatang akan menetapkan 5 Program, 13 Kegiatan, 31 Sub Kegiatan sesuai dengan program yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2024 Rencana Kerja OPD Kecamatan Sangasanga tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) Tahun kedepan. tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan yang sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Demikian rencana kerja OPD Kecamatan Sangasanga tahun 2025 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurnah maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum rencana kerja OPD Kecamatan Sangasanga tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

zz.RENJA KECAMATAN KOTA BANGUN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal Perangkat Daerah. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;

b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;

c. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;

e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD, bagi RKA Perangkat Daerah, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.1 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II

Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9 Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10 Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

14 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

15 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

16 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kota Bangun adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu Tahun Anggaran dan mempunyai fungsi :

- Sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Kota Bangun Tahun 2025 dalam rencana program prioritas.
- Sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Kota Bangun dan kegiatan Pembangunan daerah yang menjadi sehingga terwujudnya efisiensi alokasi berbagai sumber daya

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

- Terwujudnya sinergi program dan kegiatan Kecamatan Kota Bangun Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara
- Menciptakan kepastian program kegiatan dalam perencanaan alokasi sumber dana, sumber daya, serta sumber daya manusia.
- Sebagai sarana pengendalian untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Kota Bangun Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II .EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu & Capaian Renstra-PD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Renstra PD pada Tahun 2025
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Program dan kegiatan
BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Rencana Kerja (Renja) suatu Perangkat Daerah adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/Program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu suatu kebijakan / Program / kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang sah untuk mengevaluasi dan menilai kinerja.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran,neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyusunan dan Pelaksanaan Renja mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan serta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Adapun tugas pokok dan fungsi dari Kantor Kecamatan Kota Bangun adalah:

A. Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Fungsi Utama :

1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;

2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasiltas pelayanan umum;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
10. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
11. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan, pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan;
13. Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan serta Lembaga Kemasyarakatan.

C. Indikator Kinerja Utama :

1. Predikat Akuntanbilitas Kinerja Kecamatan Kota Bangun:

$$\frac{\text{Tingkat Capaian Kinerja X 100}}{\text{Target Kinerja}}$$

2. Nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Kota Bangun:

Survey data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik

3. Cakupan Aksesibilitas antar Wilayah Kecamatan Kota Bangun

$$\frac{\text{Cakupan Aksesibilitas yang dibangun X 100}}{}$$

Jumlah keseluruhan target Aksesibiltas

4. Validasi data yang dibutuhkan untuk perumusan kebijakan Daerah di Wilayah Kecamatan Kota Bangun

$$\frac{\text{Jumlah data yang terakomodir}}{\text{Jumlah keseluruhan target data dibutuhkan}} \times 100$$

Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan.Program dan kegiatan diukur sampai sejauhmana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun Tahun 2021– 2026

Penyusunan dan Pelaksanaan Renja mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan serta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas pokok dan fungsi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Organisasi Perangkat Daerah diimplementasikan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s /d Tahun 2024

Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Kota Bangun

OPD : KECAMATAN KOTA BANGUN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target (2023)	Realisasi (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4)
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	100	100	100	100	100	300	3.00
						Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	88.1	49.68	88.1	88.1	100	88.1	225.88	2.56
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2	2	2	1	50	2	5	2.50
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2500	-	0	0		500	500	0.20

					Non Usaha									
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1250	-	250	0	0	250	250	0.20
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	80	76	80	96	120	80	252	3.15
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	68	67.78	66.7	65	97	66.7	199.48	2.93
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	180		36		0	36	36	0.20
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	750	150	150	150	100	150	450	0.60
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5				0		0	0.00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1870	376	376	374	99.47	376	1126	0.60
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	78		75	0	0	75	75	0.96

7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10		6		0	6	6	0.60
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	10		2		0	2	2	0.20
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat	20		4		0	4	4	0.20
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	65	0	76	76	100	76	152	2.34
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan kecamatan	5	-	5	1	20	5	6	1.20
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	10		2		0	2	2	0.20
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60	-	12	0	0	12	12	0.20
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik	73	71.4	72	70	97	72	213.4	2.92
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	105	21	21	21	100	11	53	0.50

7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	30		6		0	6	6	0.20
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	105		11		0	11	11	0.10
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	105	-	21	21	100	11	32	0.30
X	XX	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68	67	67	0	0	67	134.01	1.97
X	XX	01.	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	3	31	3	10	31	37	3.36
X	XX	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	3	4	4	100	3	10	0.67
X	XX	01.	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25		5		0	5	5	0.20
X	XX	01.	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25		5		0	5	5	0.20
X	XX	01.	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	25		5		0	5	5	0.20
X	XX	01.	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	25		5		0	5	5	0.20

X	X X	0 1.	2. 01	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	4	4	4	100	4	12	0.60
X	X X	0 1.	2. 01	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20		4		0	4	4	0.20
X	X X	0 1.	2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	75	15	1	1	100	1	17	0.23
X	X X	0 1.	2. 02	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	40	44	40	91	44	124	2.82
X	X X	0 1.	2. 02	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	1	1	1	100	2	4	0.40
X	X X	0 1.	2. 02	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	-	12	12	100	12	24	0.40
X	X X	0 1.	2. 03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	2935	575	580	575	99	580	1730	0.59
X	X X	0 1.	2. 03	0 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	65	12	13	13	100	12	37	0.57
X	X X	0 1.	2. 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	4383		877		0	877	877	0.20
X	X X	0 1.	2. 05	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	220	-	5	0	0	5	5	0.02

X	X X	0 1.	2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum yang di sediakan	8	8	12	8	67	12	28	3.50
X	X X	0 1.	2. 06	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	375	-	30	30	100	0	30	0.08
X	X X	0 1.	2. 06	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	10	1	1	100	1	12	1.20
X	X X	0 1.	2. 06	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15	1	1	1	100	1	3	0.20
X	X X	0 1.	2. 06	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120	24	24	24	100	24	72	0.60
						Alat Tulis Kantor	120	24	24	24	100	24	72	0.60
X	X X	0 1.	2. 06	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	288,000	56000	56000	56000	100	56000	168000	0.58
X	X X	0 1.	2. 06	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan Minuman Tamu	2330	0	466	0	0	466	466	0.20
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2330		466		0	466	466	0.20
X	X X	0 1.	2. 06	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas	150	50	30	209	697	30	289	1.93
						Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	3100	1920	620	2947	475	620	5487	1.77
X	X X	0 1.	2. 06	1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	80	16	16	16	100	16	48	0.60
X	X X	0 1.	2. 06	1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	35	-	1	1	100	7	8	0.23
X	X X	0 1	2. 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	71	10	17	17	100	17	44	0.62

X	X X	0 1	2. 07	0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	0	4	4	100	1	5	1.00
X	X X	0 1	2. 07	0 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	1	0	0	1	1	1.00
X	X X	0 1.	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	9860	309	12		0	12	320.5	0.03
X	X X	0 1.	2. 08	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5000	12	12	12	100	12	36	0.01
X	X X	0 1.	2. 08	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	840	168	12	12	100	12	192	0.23
X	X X	0 1.	2. 08	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3433		684	697	102	684	1381	0.40
X	X X	0 1.	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100		100		0	100	100	1.00
X	X X	0 1.	2. 09	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	5	1	1	0	0	1	2	0.40
X	X X	0 1.	2. 09	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	20	3	4	4	100	4	11	0.55

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil Laporan Kinerja tahunan Perangkat Daerah bahwa hampir program dan kegiatan mencapai target yang diharapkan,

Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi – implikasi yang mampu mendorong kinerja Perangkat Daerah untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya :

a. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan perencanaan pembangunan
b. Dengan merealisasikan Sistem E-Planning dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
c. Adanya Perubahan/ Penambahan Nomenkaltur Permendagri No 90 Tahun 2019

Kebijakan – kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor – faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut:

a. Dalam Hal Penganggaran untuk lebih cepat di sahkan
b. Kerjasama dengan pihak stakehoders maupun Perangkat Daerah, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir.

Evaluasi Ranja Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun selama kurun waktu 1 (satu) Tahun dan perbandingan realisasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sehingga tercipta akuntabilitas kinerja kecamatan serta

memperjelas dan mempertegas posisi kecamatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.Dalam pelaksanaannya, urusan wajib meliputi bidang :

a. Bidang ketenagakerjaan, yaitu pelayanan pemberian kartu pendaftaran (AK/1) kepada pencari kerja.
b. Bidang pekerjaan umum, yaitu pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tinggal.
c. Bidang perhubungan, yaitu pemberian pelayanan terdiri dari :
    1. Izin usaha angkutan perdesaan dalam wilayah kecamatan untuk perorangan.
    2. Izin jasa titipan lokasi kecamatan.
    3. Izin usaha angkutan penyeberangan sungai/ danau dalam wilayah kabupaten.
    4. Penentuan lokasi parkir.
d. Bidang pertanahan yaitu pelayanan melegalisir serta memproses surat pelepasan hak atas tanah diwilayahnya dan mengetahui surat pernyataan pemilikan/ penguasaan tanah.
e. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
f. Bidang otonomi daerah pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian meliputi pemberian pelayanan pemungutan pendapatan daerah berupa:
    1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
    2. Angsuran jual beli eks rumah diatas yang terletak diwilayah kecamatan.
    3. Angsuran jual beli eks kendaraan dinas yang terletak diwilayah kecamatan.

Urusan pemerintahan yang secara nyata adan dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan karakteristik wilayah kecamatan yaitu urusan pilihan meliputi bidang :

a. Pertanian, pemberian pelayanan izin usaha penggilingan padi/tapioca milik warga yang tidak menggunakan modal asing.
b. Perikanan, pemberian pelayanan dasar dalam:
    1. Menetapkan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) dalam usaha :

a. Penangkapan ikan dengan kapal tidak bermotor, bermotor luar, bermotor dalam yang tidak berukuran lebih dari 5 GT (Gross Tonage) dan atau mesinnya yang berkeuatan tidak lebih dari 15 DK (Daya Kuda)
b. Budidaya ikan perairan tawar tidak lebih dari 2 Ha dan di air payau tidak lebih dari 4 Ha;
c. Pengumpulan dan pengelolaan hasil perikanan dengan kapasitas gudang tidak lebih dari 5 ton yang memenuhi syarat teknis.
2. Menetapkan Surat Keterangan Asal (SKA) hasil perikanan dalam peredaran antar Kabupaten / kota dalam provinsi.
c. Energi dan Sumber Daya Mineral, pemberian pelayanan meliputi :
1. Izin penggalian air bawah tanah untuk perorangan/masyarakat dengan diameter pipa sampai dengan 2 inci;
2. Izin usaha pemanfaatan air bawah tanah perorangan / masyarakat dengan produksi diatas 50 m^2/bulan
3. Izin usaha pengambilan dan pemanfaatan ait untuk perorangan / masyarakat dengan produksi diatas 50 m^2/bulan
d. Pariwisata, pemberian izin usaha pariwisata yang dikelola oleh perorangan yang terdiri dari :
1. Izin usaha penginapan dibawah 15 meter;
2. Izin usaha rumah makan dan minuman di bawah 25 kursi;
3. Izin usaha kolam pemancingan;
4. Izin usaha salon kecantikan;
5. Izin usaha barber shop (Potong rambut);
6. Izin usaha balai pertemuan umum;
7. Pemberian izin lapangan tenis;
8. Pemberian izin lapangan bulu tangkis tertutup;
9. Pemberian izin gelanggang tenis meja;
10. Pemberian izin lapangan sepak bola tertutup (futsal);
e. Perindustrian dan perdagangan, pemberian pelayanan atas :
1. Tanda Daftar Industri Kecil (TDIK) untuk jenis tertentu yang iusahakan perorangan dengan nilai investasi

maksimum Rp 5. 000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, terdiri dari jenis industri :

a. IK pengeringan / pengasapan ikan
b. IK gula merah
c. IK tahu dan tempe;
d. IK pengesapan karet

2. Surat Izin udaha Perdagangan (SIUP) kecil perorangan

f. Peternakan , pemberian pelayanan data :

1. Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR)
2. Surat keterangan Asal ternak untuk di sembelih / potong antar kecamatan dalam kabupaten.
3. Izin toko / kios dan pengecer obat hewan.

Fungsi Kecamatan Kota Bangun sebagai pusat pelayanan masyarakat yang merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan , Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Kota Bangun yang terealisasi dengan target yang telah ditentukan. Terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Kota Bangun :

a. Cakupan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan;
b. Tingkat Partisipasi Masyarakat;
c. Rata-rata Kinerja Kecamatan;
d. Presentase jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik
e. Cakupan Saluran Drainase/Gorong gorong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik
f. Cakupan Infrastruktur di Wilayah Kecamatan/Kelurahan
g. Cakupan Turap/Talud/Bronjong

tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kota Bangun dapat dilihat dari Tabel 2.2 pada lampiran.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Kota Bangun
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	13	15
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	-	Survei berdasarkan Kepuasan Pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan (Permenpan No. 14 Tahun 2017).	70%	75%	70%	70%	N/A	83,51	70%	70%	
2	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	-	Menurunnya keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	75%	75%	75%	75%	N/A	80%	75%	75%	
3	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	75%	75%	75%	75%	75%	100%	75%	75%	
4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	-	Meningkatnya pendapatan Asli Desa	69.70%	69.70%	69.70%	69.70%	69.65%	16%	69.70%	69.70%	
5	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	-	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah Kecamatan	30%	30%	30%	30%	0%	N/A	0%	0%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Kota Bangun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana teknis kewilayahan memiliki wilayah kerja tertentu, wilayah kerja meliputi 11 Desa yang menjadi wewenang Kecamatan Kota Bangun. Dengan kondisi gambaran Umum dan Georafis yang berbeda disetiap Desa serta kebutuhan masyarakat yang berbeda pula maka wilayah Kecamatan Kota Bangun memiliki potensi potensi yang sangat beragam.

Kecamatan Kota Bangun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki beberapa kelemahan faktor eksternal serta faktor internal di dalam kelancaran proses pencapaian tujuan yang akan menjadi isu-isu penting dalam menjalankan Visi dan Misinya sebagai pengemban wewenang Bupati Kutai kartanegara yang dilaksanakan oleh Camat Kota Bangun selain itu juga tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan f

u
n
g
s
i
,

1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai
2. Sistem kerja yang belum optimal
3. Sumber Daya Manusia yang belum optimal
4. Kapasitas Kelembagaan Desa yang belum optimal
5. Infrastruktur perdesaan yang masih kurang

serta tugas koordinasi. Kecamatan Kota Bangun masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan ke depan ,terkait dengan beberapa permasalahan, antara lain :

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Kota Bangun secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Bidang Pemerintahan:
    1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan :
        a. Bahwa masih banyak warga yang belum mendapatkan KTP-Elektronik karena terbatasnya bahan cetak;

b. Jaringan internet yang terkadang tidak stabil sehingga pada saat warga berurusan Aplikasi tidak dapat terakses

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengajukan permohonan penambahan kuota pencetakan KTP Elektronik, dan juga memberikan infomasi ke aparatur desa apabila terjadi kendala jaringan

2) Pembinaan Perangkat Desa, Permasalahan:

a. Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Aparatur Desa serta sarana Prasarana Kantor yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien dan muncul inovasi inovasi yang baru.

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain mengadakan bimtek untuk meningkatkan SDM aparatur desa itu sendiri, Pembinaan secara berkesinambungan baik dari tata kelola pemerintahan, produk hukum desa, tata kelola keuangan dan aset desa dan tata kelola kearsipan

B. Bidang Pertanahan Dan Aset, Permasalahan:

a. Masih terbatasnya pemberian kuota pembuatan sertifikat hak milik tanah pada Proyek Operasi Nasional Agraria atau Prona sehingga dapat memunculkan kecemburuan sosial

b. Tata Kelola Aset yang masih belum optimal

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melakukan inventaris kepada masyarakat yang tidak dapat porsi pembuatan SHM dan kita berikan pengertian agar tidak muncul kecemburuan yang mengarah konflik. Dan Pembinaan secara berkesinambungan untuk tata kelola Aset desa agar tertib

C. Bidang Ekonomi Pembangunan & Pemberdayaan Perempuan,

Permasalahan :

a. Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang masih belum direalisasi;
b. Minimnya sosialisasi dari Stake Holder yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
c. Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Upaya yang telah dilakukan:

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat Kelurahan maupun kecamatan dengan dengan stake holder atau dinas terkait.

D. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan :

a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
b. Kurangnya pelatihan pelatihan dari instansi maupun lembaga yang dapat meningkatkan keterampilan para generasi muda yang di masing-masing wilayah.

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan stake holder atau dinas terkait.

E. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat, *Permasalahan:*

a. Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
b. Masih tingginya penggunaan Miras dan Narkoba;
c. Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Rekomendasi :

1. Mengadakan rapat pembinaan Linmas dan Koordinasi satgas yang lain;
2. Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana Pembentukan satuan Linmas tanggap bencana;
3. Mengadakan Sosialisasi secara berkala;
4. Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Selain itu juga dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kota Bangun, dengan pertimbangan atas kajian terhadap pelayanan dan pelaksanaan pemerintahan kecamatan Kota Bangun juga berupaya dengan :

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dimaksudkan adalah untuk :

   Mewujudkan produk-produk peningkatan kualitas pelayanan aparatur yang professional, berdedikasi tinggi dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dengan sasaran terwujudnya pelayanan prima dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan yang aspiratif, partisipatif, akuntabel melalui :

   - Melaksanakan tugas pemerintahan denga penuh tanggung jawab.
   - Melaksanakan tugas pembangunan di segala aspek yang di landasi rasa adil dan merata.
   - Memberikan Pelayanan yang terbaik
   - Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM

3. Memberdayakan potensi daerah berbasis sumber daya lokal adalah :
   - Mewujudkan sistem pengelolaan aset aset daerah yang efektif efisien dengan sasaran terpeliharanya aset aset daerah secara optimal. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan tujuan sasaran yang ingin dicapai ;
   - Meningkatkan pemerataan dan distribusi hasil-hasil pembangunan dengan sasaran berkurangnya kesenjangan (disparitas) antar wilayah ;

- Mewujudkan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup dengan sasaran terwujudnya proses pembangunan yang berkelanjutan ;

3. Memberdayakan lembaga kemasyarakatan dengan semangat dari dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah : memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan, dengan harapan konsep pembangunan adalah milik semua masyarakat, bahkan sebatas kemauan dan keinginan dari masyarakat untuk mewujudkan konsepsi dasar tersebut mutlak harus di berikan ruang kepada lembaga kemasyarakatan yang ada, agar keberadaan lembaga yang ada ini bersama pemerintah berusaha memaksimalkan potensi yang dimiliki.
4. Mewujudkan ciri khas wilayah yang berbasis agraris dan perikanan dengan konsekuensi dari daerah agraris dan perikanan adalah pertumbuhan ekonomi, percepatan pembangunan dapat dimaksimalkan maka produk-produk yang ada di daerah tidak boleh lagi dijual dalam bentuk bahan mentah akan tetapi harus diproses , untuk itu kedepan masuknya industrialisasi ke Kota Bangun harus dapat memperkuat sektor agraris dan perikanan dengan memberdayakan potensi lokal yang tersedia sangat cukup diwilayah ini.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Dan Renstra PD pada Tahun 2025

Rencana Kerja Kecamatan Kota Bangun berdasarkan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kota Bangun.

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada Tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan

kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Review rancangan awal RKPD Kecamatan Kota Bangun adalah perbandingan antara program/kegiatan yang tertuang ke dalam rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan Perangkat Daerah atau adanya perubahan program kegiatan yang tidak sesuai dengan tupoksi Perangkat Daerah.

Review secara rinci dapat disampaikan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel TC 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

PD : KECAMATAN KOTA BANGUN

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	
	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kota Bangun**	**Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP**	**100**	**Persen**	**200,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kota Bangun**	**Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP**	**100**	**Persen**	**1,030,343,000**	
		Kota Bangun	**Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan**	**88.10**	**Persen**	**700,000,000**		**Kota Bangun**	**Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan**	**88.10**	**Persen**	**5,640,000,000**	
1.1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kota Bangun**	**Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif**	**0**	**kegiatan**	**-**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kota Bangun**	**Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif**	**0**	**kegiatan**	**400,000,000**	
1.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Bangun	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaadan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	Kali		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Bangun	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	Laporan	150,000,000	
1.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	Dokumen		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	Dokumen	250,000,000	
1.2	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kota Bangun**	**Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi**	**0**	**SPM**	**-**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kota Bangun**	**Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi**	**0**	**SPM**	**100,000,000**	
1.2.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	-	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	-	
1.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	-	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	100,000,000	
1.3	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Kota Bangun**	**Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**0**	**Kali**	**-**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Kota Bangun**	**Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**0**	**Kali**	**-**	
1.3.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2	Dokumen		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2	Dokumen		

1.3.2	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Kota Bangun	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	4	Unit		Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Kota Bangun	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	4	Unit		
1.4	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kota Bangun**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat**	**2**	**Kegiatan**	**900,000,000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kota Bangun**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat**	**2**	**Kegiatan**	**6,670,343,000**	
1.4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4	Dokumen	-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4	Dokumen	-	
1.4.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2	Laporan	200,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	5	Laporan	1,030,343,000	
1.4.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	Laporan	700,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	Laporan	5,640,000,000	
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kota Bangun**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif**	**60**	**Persentase**	**148,328,881**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kota Bangun**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif**	**60**	**Persentase**	**586,000,000**	
2.1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kota Bangun**	**Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan**	**33**	**Kali**	**148,328,881**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kota Bangun**	**Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan**	**33**	**Kali**	**100,000,000**	
2.1.1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kota Bangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7	Lembaga	10,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kota Bangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7	Lembaga	50,000,000	
2.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	Dokumen		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	Dokumen		
2.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	138,328,881	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	50,000,000	
2.2	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang fasilitasi**	**3**	Lembaga		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang fasilitasi**	**3**	Lembaga	**486,000,000**	
2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga	-	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga	486,000,000	
3	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kota Bangun**	**persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan**	**75**	**persen**	**-**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kota Bangun**	**persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan**	**75**	**persen**	**175,000,000**	
3.1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kota Bangun**	**Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**2**	**Kegiatan**	**-**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kota Bangun**	**Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**2**	**Kegiatan**	**175,000,000**	
3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan		

3.1.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kota Bangun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	Laporan		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kota Bangun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	Laporan	175,000,000	
3.2	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kota Bangun**	**Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	**4**	**Kegiatan**	**-**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kota Bangun**	**Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	**4**	**Kegiatan**	**-**	
3.2.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kota Bangun	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4	Laporan		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kota Bangun	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4	Laporan		
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kota Bangun**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**55**	**Persen**	**116,125,755**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kota Bangun**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**55**	**Persen**	**215,000,000**	
4.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kota Bangun**	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan**	**5**	**Kegiatan**	**116,125,755**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	***Kota Bangun***	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan**	**5**	**Kegiatan**	**215,000,000**	
4.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bangun	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	Orang		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Kota Bangun*	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	Orang		
4.1.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kota Bangun	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Yang Difasilitasi	50	Orang		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	*Kota Bangun*	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Yang Difasilitasi	50	Orang		
4.1.3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kota Bangun	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50	Orang		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Kota Bangun*	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50	Orang		
4.1.4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Bangun	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	113,625,755	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Kota Bangun*	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	Orang	210,000,000	
4.1.5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bangun	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	3	Laporan	-	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bangun	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	3	Laporan	-	
4.1.6	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Kota Bangun	Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	2	kegiatan	-	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Kota Bangun	Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	2	kegiatan	-	
4.1.7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2	Dokumen	-	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2	Dokumen	-	
4.1.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2	Dokumen	2,500,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2	Dokumen	5,000,000	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kota Bangun**	**Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik**	**71.42**	**Persen**	**27,500,000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kota Bangun**	**Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik**	**71.42**	**Persen**	**5,000,000**	

5.1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kota Bangun**	**Jumlah Desa Yang difasilitasi**	**11**	**Desa**	**27,500,000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kota Bangun**	**Jumlah Desa Yang difasilitasi**	**11**	**Desa**	**5,000,000**	
5.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6	Dokumen		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6	Dokumen		
5.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11	Dokumen		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11	Dokumen		
5.1.3	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11	Dokumen	25,000,000	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11	Dokumen	-	
5.1.4	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	3	Laporan		Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bangun	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	3	Laporan		
5.1.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	11	Dokumen		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	11	Dokumen		
5.1.6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	11	Dokumen	2,500,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	11	Dokumen	5,000,000	
5.1.7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	11	Dokumen		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	11	Dokumen		
5.1.8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2	Dokumen		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2	Dokumen		
6	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bangun**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**67**	**Poin**	**4,733,863,328**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bangun**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**67**	**Poin**	**7,279,154,942**	
6.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Bangun**	**Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11**	**dokumen**	**25,967,377**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Bangun**	**Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11**	**dokumen**	**605,000,000**	
6.1.1	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kota Bangun	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	data	-	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kota Bangun	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200	data	300,000,000	
6.1.2	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang urusan yang di ampu dalam rangka penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bangun	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	Berita Acara	-	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang urusan yang di ampu dalam rangka penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bangun	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Berita Acara	25,000,000	
6.1.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	20,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	140,000,000	
6.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	5,000,000	
6.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	5,000,000	
6.1.6	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	-	
6.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dokumen	-	

6.1.8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	laporan	5,967,377	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	laporan	70,000,000	
6.1.9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bangun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	laporan	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bangun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	laporan	60,000,000	
6.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Bangun**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**15**	**laporan**	**3,370,707,710**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Bangun**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**15**	**laporan**	**4,536,966,701**	
6.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bangun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	Orang/bulan	3,362,707,710	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bangun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	Orang/bulan	4,406,966,701	
6.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10	Dokumen		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10	Dokumen		
6.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10	Dokumen		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10	Dokumen		
6.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10	Dokumen		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10	Dokumen		
6.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	laporan	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13	laporan	25,000,000	
6.2.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	Dokumen		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	Dokumen		
6.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	laporan	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	laporan	80,000,000	
6.2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	25,000,000	
6.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kota Bangun**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan**	**575**	**unit**	**27,278,712**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kota Bangun**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan**	**575**	**unit**	**272,278,712**	
6.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bangun	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bangun	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	25,000,000	
6.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	7,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	150,000,000	
6.3.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	50,000,000	
6.3.4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan		
6.3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	laporan	20,278,712	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	laporan	47,278,712	
6.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	laporan		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	laporan		
6.3.7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen		

6.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Bangun**	**Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**40**	**orang**	**32,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Bangun**	**Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**40**	**orang**	**32,000,000**	
6.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bangun	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bangun	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	32,000,000	
6.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bangun	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Orang	32,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bangun	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Orang	0	
6.4.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bangun	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Orang	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bangun	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Orang	-	
6.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Bangun**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia**	**8**	**Layanan**	**245,500,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Bangun**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia**	**8**	**Layanan**	**240,500,000**	
6.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bangun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bangun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	-	
6.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bangun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	23,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bangun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	25,000,000	
6.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bangun	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	10,500,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bangun	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	10,500,000	
6.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bangun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	20,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bangun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	20,000,000	
6.5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bangun	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	25,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bangun	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	25,000,000	
6.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bangun	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3	jenis	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bangun	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3	jenis	-	
6.5.7	Penyediaan Bahan/Material	Kota Bangun	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	-	Penyediaan Bahan/Material	Kota Bangun	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	-	
6.5.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bangun	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan	10,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bangun	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan	10,000,000	
6.5.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Laporan	125,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Laporan	125,000,000	
6.5.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	Dokumen	25,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bangun	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	Dokumen	25,000,000	
6.5.11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	laporan	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bangun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	laporan		
6.6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Bangun**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**18**	**Unit**	**100,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Bangun**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**18**	**Unit**	**607,000,000**	
6.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bangun	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bangun	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	100,000,000	
6.6.2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bangun	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	*Unit*	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bangun	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	*Unit*	507,000,000	
6.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bangun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	20,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bangun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	-	
6.6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bangun	Jumlah UnitSarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	Unit	80,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bangun	JumlahUnitSarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	Unit	-	

6.7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bangun**	**Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12**	**bulan**	**759,251,364**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bangun**	**Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12**	**bulan**	**759,251,364**	
6.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	2,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	2,000,000	
6.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	*Laporan*	402,560,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	*Laporan*	402,560,000	
6.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	354,691,364	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	354,691,364	
6.8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bangun**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara**	**509**	**Unit**	**178,158,165**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bangun**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara**	**509**	**Unit**	**226,158,165**	
6.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bangun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	unit	2,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemel	Kota Bangun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	unit	50,000,000	
6.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bangun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	unit	103,658,165	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bangun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	unit	173,658,165	
6.8.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Bangun	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1	unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Bangun	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1	unit	-	
6.8.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Bangun	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan		unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Bangun	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan		unit	-	
6.8.5	Pemeliharaan Mebel	Kota Bangun	Jumlah Mebel yang dipelihara	20	unit	-	Pemeliharaan Mebel	Kota Bangun	Jumlah Mebel yang dipelihara	20	unit	-	
6.8.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bangun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1	unit	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bangun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1	unit	2,500,000	
6.8.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bangun	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	25	unit	-	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bangun	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	25	unit	-	
						5,930,817,964.00						**15,430,497,942**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan Kota Bangun dilakukan melalui kegiatan Musyawarah Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) yang diikuti oleh perwakilan 11 desa berdasarkan hasil kesepakatan seluruh pemangku Desa dengan membawa hasil musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes).

Dalam hal pencapaian program pembangunan tersebut Peran Pemerintahan Desa, kecamatan , dan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki andil yang besar selain itu juga peran seluruh komponen masyarakat, swasta dan stakeholder pembangunan sangat diharapkan dalam menyumbang tingkat pencapaian kineja pembangunan, diantaranya melalui program swadaya masyarakat dengan kegiatan gotong royong atau perusahaan-perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility(CSR).

Dalam hal pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan harus berfokus pada pembangunan yang sinkron dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhatikan kepada tugas pokok dan fungsi OPD itu sendiri, dengan memperhatikan fokus pembangunan Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang dapat mempercepat laju pembangunan antara lain :

Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih dengan Fokus Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun2025

Selanjutnya, untuk lebih detail tentang usulan program dan kegiatan yang telah disusun berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan dan telah terinput pada SIPD adalah sebagai berikut :

TABEL T-C 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	Pembangunanpeningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Jalan.Jembatan Ulin Poros pela RT 001, RT 006,	Panjang jalan yang di bangun	150 M	
2	Rehab BeratSedangRingan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Jalan Jembatan Ulin Rt 003,	Panjang jalan yang di bangun	150 M	
3	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Jl. Mulawarman I RT. 001 Desa Kota Bangun Ulu,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
4	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Jl. Mulawarman II RT. 006 Desa Kota Bangun Ulu,	luas Gedung yang di bangun	1 Paket	
5	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Jl. H.M Aini H RT. 012 Desa Kota Bangun Ulu,	Panjang jalan yang di bangun	130 M	
6	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Jl. Mulawarman I RT. 001 Desa Kota Bangun Ulu,	luas Gedung yang di bangun	1 Paket	
7	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Desa Kota Bangun Ilir Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.,	Panjang jalan yang di bangun	150 M	
8	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	Jembatan Ulin Gang ABS 1 , RT.001 ,	Panjang jalan yang di bangun	150 M	
9	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	Jembatan Ulin Gang ABS 2 ,RT.001,	Panjang jalan yang di bangun	150 M	
10	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	Jembatan Ulin Gang ABS 3 ,RT.001,	Panjang jalan yang di bangun	150 M	
11	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	Jl. Mulawarman I RT. 001,	Panjang jalan yang di bangun	150 M	
12	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun,	Panjang jalan yang di bangun	150 M	
13	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Desa Kota Bangun Ilir Rt 014(Batas Desa) Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.,	Panjang jalan yang di bangun	150 M	
14	Penyediaan Mesin KapalPerahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT	Jl. Jembatan Ulin Poros Pela RT 002,	Jumlah mesin Kapal	10 Unit	
15	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Gang ABS 1 Dan Gang ABS 2 ,RT.001,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
16	Penyediaan Mesin KapalPerahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT	Jl. jembatan ulin poros Pela RT 002,	Jumlah mesin Kapal	10 Unit	
17	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Desa Kota Bangun Ilir Rt 10 Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	

18	Penyediaan Benih Ikan Udang	Jl. Jembatan Ulin Poros Pela RT 002,	Jumlah Benih yang disediakan	5000	
19	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Lapangan Bola ABS , RT. 001,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
20	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Perbatasan KBU dan KBI ,RT.001,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
21	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Desa kota bangun Ilir Rt 04 Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai kartanegara.,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
22	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	Jalan Cempaka, Rt.002,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
23	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Gang Karya Tani RT.002,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
24	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Jl. Mulawarman I Gang Rahmat RT.002,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
25	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren (hibah uang)	RT.002,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
26	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	RT.002,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
27	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan Kota Bangun	Dusun Sidomulyo,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
28	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan Kota Bangun	Desa Loleng,	Jumlah unit jaringan air	1 Paket	
29	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	Desa Loleng,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
30	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Desa Loleng RT 011,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
31	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	RT 003 Desa Loleng,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
32	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	RT 004 Desa Loleng,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
33	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	RT 005 Desa Loleng,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
34	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	RT 006 Desa Loleng,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
35	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Dusun Margomulyo RT 009 Desa Loleng,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
36	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	Desa Loleng (Jalan Pinang Kadep),	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
37	Penyediaan Mesin KapalPerahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT	Jalan. Jembatan Ulin Poros 1 Rt 006,	Jumlah mesin Kapal	10 Unit	
38	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	RT 011 Desa Loleng (Gunun Panjang),	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
39	Peningkatanpemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Desa	RT 002 Desa Loleng,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	

40	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	RT 002 Desa Loleng (Tj. Mpial),	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
41	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	RT 002 Desa Loleng (BINA KARYA),	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
42	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	RT 009 Desa Loleng,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
43	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	RT 004 Desa Loleng (BPU),	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
44	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Gang Tani RT.003,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
45	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Gang Akbar RT.003,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
46	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	RT.003,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
47	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Gang Ening RT.006,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
48	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Jl. Mulawarman II Gang Al-Falah RT.006,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
49	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Gang Al-Jamaal RT.006,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
50	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Gang Al-Jamaal RT.006,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
51	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	Gang Al-falah RT.006,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
52	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
53	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	Jl. Mulawarman II RT. 007,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
54	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	Gang Yayasan RT.007,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
55	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	Gang Titipan RT.007,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
56	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan (Perkotaan)	JL. Suta Pranata RT.007,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
57	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	Gang Pintu 14, RT.009,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
58	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Gang Sejahtera,RT.009,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
59	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	Gang Sejahtera,RT.009,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
60	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Jl. Mulawarman II RT. 009,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
61	Rehabilitasi Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	jl.Awang Long RT.06 Desa Kota Bangun Seberang,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	

62	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Kota Bangun	jl. awang long desa kota bangun seberang,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
63	Pembangunanpeningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	jl.pangeran indra jaya RT.03 Desa Kota Bangun Seberang,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
64	Penyediaan Mesin KapalPerahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT	Jl. jembatan ulin poros pela RT 006,	Jumlah Unit yang disediakan	10 Unit	
66	Penyediaan Mesin KapalPerahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT	Jl. jembatan ulin poros pela RT 005,	Jumlah Unit yang disediakan	10 Unit	
67	Penyediaan Mesin KapalPerahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT	Jl. jembatan ulin poros pela RT 001,	Jumlah Unit yang disediakan	10 Unit	
68	Penyediaan Benih Ikan Udang	Jl. jembatan ulin poros pela RT 006,	Jumlah Unit yang disediakan	10000	
69	Penyediaan Benih Ikan Udang	Jl. jembatan ulin poros pela RT 004,			
70	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	RT 011 Desa Loleng (Simpang Trans),	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
71	Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir	RT 002 Desa Loleng,	Panjang Sunga yang dinormalisasi	200 M	
72	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	RT 011 Desa Loleng (P. Ajis-Heru) ,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
73	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Desa	RT 011 Desa Loleng (Singgin),	Panjang saluran yang di normalisasi	200 M	
74	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	jl.awang long RT.06 desa kota bangun seberang,	Jumlah Gedung yang di bangun	2 Unit	
75	Pembangunanpeningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	jl.djemain sam RT.07 desa kota bangun seberang,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
76	Peningkatanpemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Desa	jl.hasan basri rt.12 desa kota bangun seberang,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
77	Peningkatanpemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Desa	jl.pateh kota RT.14 desa kota bangu seberang,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
78	Peningkatanpemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Desa	jl.pateh kota rt.03 desa kota bangun seberang,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
79	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	jl.awang long desa kota bangun seberang,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
80	Peningkatanpemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Desa	jl.pateh kota rt.13 ,desa kota bangun seberang,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
81	Peningkatanpemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Desa	jl.pateh kota rt.15 desa kota bangun seberang,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
82	Event Olahraga Tradisional dan Rekreasi	jl.pateh kota RT.08 desa kota bangun seberang,			
83	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Jl. H.M Aini H RT. 011 ,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
84	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Jl. Mulawarman II RT. 006,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	

85	Pemeliharaan Penerangan Bangunan	Jl. M. Siddiq RT. 017,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
86	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Jl. H.M Aini H RT. 011,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
87	PembangunanPenyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan pengumpan lokal	Jl. H.M Aini H RT. 014,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
88	Peningkatanpemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Desa	Jl. H.M Aini H RT. 015,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
89	Peningkatanpemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Desa	Jl. H. M Aini H RT. 015,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
90	Peningkatanpemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Desa	Jl. H.M Aini H RT. 015,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
91	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Jl. H.M Aini H RT. 015,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
92	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	Jl. M. Siddiq RT. 017 penghubung ke Jl. H.M Aini H ,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
93	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jl. KH. Dewantara RT. 011,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
94	Peningkatanpemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Desa	Jl. H.M Aini H RT. 015,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
95	Peningkatanpemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Desa	Jl. H.M Aini H RT. 015,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
96	Peningkatanpemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Desa	Jl. H.M Aini H RT. 015 penghubung ke Jl. M. Siddiq RT. 017,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
97	Peningkatanpemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Desa	JL AWANG LONG RT 09 GANG MELATI,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
98	Rehabilitasi Jalan Menuju Akses Pendidikan,Kesehatan, Wisata dan Jalan Produksi Kabupaten	Jln Jembatan Ulin Poros Rt 001,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
99	Peningkatanpemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Desa	Jl AWANG LONG RT 02,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
100	Peningkatanpemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Desa	JL AWANG LONG RT 13,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
101	Peningkatanpemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Desa	JL Awang long RT 11,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
102	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	Desa Kota Bangun Ilir Rt 10 Menuju Rt 11,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
103	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	Desa Kota Bangun ilir Dusun Al-Irsyad Rt 12 ,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
104	Peningkatanpemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Desa	JL AWANG LONG RT 08 DESA KOTA BANGUN ILIR,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
105	Penyediaan KapalPerahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT	Jalan.Jembatan Ulin Poros Rt 04,	Jumlah Kapal	10 Unit	
106	Pembuatan Tempat Sampah Penampungan Sementara	Jln. Jembatan Ulin Rt 05,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
107	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Desa Kota Bangun ilir Rt 13 ,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	

108	Pemeliharaan Penerangan Bangunan	JL DARMAWAN RT 14,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
109	Peningkatanpemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Desa	Desa Kota Bangun Ilir Rt 08,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
110	Peningkatanpemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Desa	JL AWANG LONG RT 14 GANG DENSANAK,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
111	Peningkatanpemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Desa	JL AWANG LONG RT 14 GANG PLAMBOYAN,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
112	Pengadaan ambulans desa darat dan air	Desa Kota Bangun Ilir Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. ,	Jumlah Unit	1 unit	
113	Rehab BeratSedangRingan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	JL.H.M BAKRIE RT.004 DESA KEDANG MURUNG,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
114	Penyediaan Bahan Pembuatan Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan (BubuKawat Tempirai)	JL.RIMBA AYU RT.007 DESA KEDANG MURUNG,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
115	Fasilitasi Organisasi keolahragaan	JL.RIMBA AYU RT.007 DESA KEDANG MURUNG,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
116	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	JL.RANCANG RIMBA AYU RT.010 DESA KEDANG MURUNG KECAMATAN KOTA BANGUN,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
117	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	JL.RIMBA AYU RT.007/008 DESA KEDANG MURUNG KECAMATAN KOTA BANGUN,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
118	Rehabilitasi Jalan Menuju Akses Pendidikan,Kesehatan, Wisata dan Jalan Produksi Kabupaten	JL.H.M.BAKRIE RT.004 DESA KEDANG MURUNG KECAMATAN KOTA BANGUN,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
119	Rehabilitasi Jalan Menuju Akses Pendidikan,Kesehatan, Wisata dan Jalan Produksi Kabupaten	JL.H.M.BAKRIE RT.004 DESA KEDANG MURUNG KECAMATAN KOTA BANGUN,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
120	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	JL.PANGERAN ANTASARI RT.008 DESA KEDANG MURUNG KECAMATAN KOTA BANGUN,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
121	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	JL.H.M.BAKRIE RT.004 DESA KEDANG MURUNG KECAMATAN KOTA BANGUN,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
122	Rehabilitasi Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	JL.RIMBA AYU RT.007 DESA KEDANG MURUNG KECAMATAN KOTA BANGUN,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
123	Rehabilitasi Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	JL.RIMBA AYU RT.007 DESA KEDANG MURUNG KECAMATAN KOTA BANGUN,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
124	Rehab BeratSedangRingan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	JL.H.M.BAKRIE RT.004 DESA KEDANG MURUNG KECAMATAN KOTA BANGUN,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
125	Pengembangan Sawit Rakyat (Pengadaan Bibit SawitHa)	JL.RIMBA AYU RT.007 DESA KEDANG MURUNG KECAMATAN KOTA BANGUN ,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	

126	PembangunanPenyediaan Sarana dan Prasarana Dermaga Sungai dan Danau	JL.RANCANG RT.010 DESA KEDANG MURUNG KECAMATAN KOTA BANGUN,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
127	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	JL.RAJAK RT.011 DESA KEDANG MURUNG KECAMATAN KOTA BANGUN,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
128	Rehabilitasi Jalan Menuju Akses Pendidikan,Kesehatan, Wisata dan Jalan Produksi Kabupaten	JL.H.M.BAKRIE RT.004 DESA KEDANG MURUNG KECAMATAN KOTA BANGUN,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
129	Rehab BeratSedangRingan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	JL.H.M.BAKRIE RT.004 DESA KEDANG MURUNG KECAMATAN KOTA BANGUN,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
130	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	jl. mulawarman RT.03,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
131	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	jl. mulawarman RT.03,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
132	Ruang Terbuka Non Hijau di perkotaan (Paving, RabatSemenisasi)	jl.mulawarman RT.05,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
133	Ruang Terbuka Non Hijau di perkotaan (Paving, RabatSemenisasi)	jl.mulawarman RT.01,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
134	Pembangunanpeningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	jl.mulawarman RT.01,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
135	Pengembangan Sawit Rakyat (Pengadaan Bibit SawitHa)	jl.mulawarman,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
136	Penurapan Jalan (BetonPasangan Batu)	Jl mulawarman RT. 05,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
137	Penyediaan Mesin KapalPerahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT	Jl Mulawarman RT. 01,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
138	Penyediaan Mesin KapalPerahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT	Jl Mulawarman RT. 04,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
139	Pengadaan bibit Ternak Kerbau	Jl Mulawarman RT. 01,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
140	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pengadaan Pupuk SawitHa)	jl. mulawarman,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
141	Penyediaan Bahan Pembuatan Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan (BubuKawat Tempirai)	jl. mulawarman,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
142	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Jl Mulawarman RT. 01,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
143	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Jl Mulawarman RT. 01,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
144	Ruang Terbuka Non Hijau di perkotaan (Paving, RabatSemenisasi)	Jl Mulawarman RT. 03,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	

145	Peningkatan Jaringan Irigasi dibawah 1000 Ha	Jalan Poros Tabang Kota Bangun Desa Sebelimbingan , , Kota Bangun Sebelimbingan,	luas jaringan irigasi yang disediakan	200 M	
146	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	Jln.Jembatan Ulin Rt 06,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
147	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	Gang karet RT. 021 Jalan Sri Bangun ,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
148	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Jalan Sri Bangun RT. 019,	Jumlah Unit gedung yang disediakan	1 Unit	
149	PembangunanPenyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan pengumpan lokal	Desa Muhuran Rt. 005,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
150	Ruang Terbuka Non Hijau di perkotaan (Paving, RabatSemenisasi)	Desa Muhuran RT 01 s/d 05,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
151	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Desa Muhuran RT. 004,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
152	Rehabilitasi Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	JL. Panglima Suta Kanan RT. 005,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
153	Rehabilitasi Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Jl. K.H Dewantara RT. 011,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
154	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	JL. Awang Long RT. 07.08.09,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
155	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Jl. Murunan RT 12,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
156	PembangunanRehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Kota Bangun	Jl. Panglima Suta Kanan RT. 001,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
157	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	Jl. Sri Bangun RT. 020,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
158	Rehabilitasi Puskesmas	Jl. Jend. A Yani RT. 008,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
159	Rehabilitasi Puskesmas	Jl. Jend. A Yani RT. 008,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
160	Rehabilitasi Puskesmas	Jl. Jend. A Yani RT. 008,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
161	Rehabilitasi Puskesmas	Jl. Jend. A Yani RT. 008,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
162	Rehabilitasi Puskesmas	Jl. Jend. A Yani RT. 008,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
163	Rehabilitasi Puskesmas	Jl. Jend. A Yani RT. 008,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
164	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Jl. H.M Aini H RT. 013,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
165	PembangunanRehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Kota Bangun	Jl. Panglima Suta Kanan RT. 001,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	

166	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Jl. Sri Bangun RT. 020,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
167	Rehabilitasi SedangBerat GedungRuang KelasRuang Guru PAUD	Jl. Mulawarman I RT. 002,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
168	Pembangunan Ruang KelasGuru PAUD	Jl. K.H Dewanatara RT. 018,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
169	Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam PAUD	Jl. K.H Dewantara RT. 018,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
170	Pembangunan Turap Desa dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Kota Bangun	Jl. Sri Bangun RT. 020,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
171	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Jl. P. Suta Kanan RT. 002 Dusun Beringin,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
172	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	Jl. Sri Bangun RT. 020 ,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
173	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	RT. 007 Dusun Teratai,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
174	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	Jl Panglima Suta Kanan,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
175	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Jl. P. Suta Kanan RT. 002 Dusun Beringin,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
176	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Jl. P. Suta Kanan RT. 002 Dusun Beringin,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
177	Penyediaan KapalPerahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT	Jl. Awang Long RT 006,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
178	PembangunanRehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Kota Bangun	Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun,	Jumlah bangunan yang di rehab	1 Unit	
179	Pembangunanpeningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Desa Sangkuliman Jalan Gang Darat RT 5 Sampai 8,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
180	Pembangunanpeningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	jalan Jembatan RT 5 Sampai 8 Arah Pinggir Sungai,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
181	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Jalan Karya Utama Gg Nusa indah 11 RT 8 menuju Kuburan Arah Darat,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
182	Pembangunanpeningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	sangkuliman RT 8 Sampai Sebrang Desa Pela,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
183	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Mesin Pompa, Selang, Nozle, Conection, baju tahan panas, sepatu, helm) (Karhutla)	Desa Sangkuliman,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
184	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	desa sangkuliman,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	

185	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Desa Sangkuliman RT 1,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
186	Rehab BeratSedangRingan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Desa Sangkuliman RT 7,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
187	Penyediaan perlengkapan Jalan (LPJU)	RT 1 Smpai RT 8 Jalur Sungai dan RT 5 Sampai 8 Jalur Darat,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
188	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Kantor BPD RT 05,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
189	Peningkatan Jaringan Irigasi dibawah 1000 Ha	desa kota bangun seberang,	luas jaringan irigasi yang disediakan	200 M	
190	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	jl.awang long desa kota bangun seberang,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
191	Pembangunan Turap Desa dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Kota Bangun	Jalan Panglima Suta Kanan RT 003 Desa Liang Ilir,	Panjang Turap yang dibangun	200 M	
192	Pengadaan ambulans desa darat dan air	Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun,	Jumlah Unit kendaraan	1 Unit	
193	Kendaraan Pendukung Bank Sampah (Kendaraan Bermotor Roda Tiga)	Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun,	Jumlah Unit kendaraan	10 Unit	
194	Ruang Terbuka Non Hijau di perkotaan (Paving, RabatSemenisasi)	Ex. lapangan pesawat ,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
195	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Jalan Panglima Suta Kanan RT 005 Desa Liang,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
196	Fasilitasi sarana prasarana desa	Dusun cempaka Desa Kota Bangun Ulu,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
197	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Jalan Panglima Suta Kanan RT 005 Desa Liang,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
198	Pembangunanpeningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Jalan Panglima Suta Kanan RT 001 Desa Liang Ilir,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
199	Pembangunanpeningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Jalan Panglima Suta Kanan RT 003 Desa Liang,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
200	Pembangunanpeningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Jalan Panglima Suta Kanan RT 004 Desa Liang Ilir,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
201	Pembangunanpeningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Jalan Panglima Suta Kanan RT 005 Desa Liang Ilir,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
202	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Jl. P. Suta Kanan RT. 007 Dusun Teratai,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
203	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Jl. P. Suta Kanan RT. 009 Dusun Cempaka,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
204	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	Jl. P. Suta Kanan RT. 002 Dusun Beringin,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	

205	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	jalan.Jembatan ulin rt 05,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
206	Pembangunan Turap Desa dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Kota Bangun	Rt 03,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
207	Pembangunan Turap Desa dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Kota Bangun	RT 01,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
208	Penanaman PohonPenghijauan Untuk Pelindung Kampung	RT 05,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
209	Penyediaan perlengkapan Jalan (LPJU)	RT 01 s/d RT 06,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
210	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jl. P. Suta Kanan RT. 002 Dusun Beringin,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
211	Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA)	RT 03,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
212	Pembangunanpeningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Jalan Panglima Suta Kanan RT 006 Desa Liang,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
213	Pembangunanpeningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Jalan Panglima Suta Kanan RT 007 Desa Liang Ilir,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
214	Peningkatanpemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Desa	Jl. H.M Aini H RT. 015,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
215	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	Jl. M. Siddiq RT. 017,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
216	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	Jl. M. Siddiq RT. 017,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
217	Penyediaan Alat Kesenian	Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun ,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
218	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan di dunia usaha	Desa kota Bangun Ulu Kecamatan kota Bangun ,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
219	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Rambu, Marka, ZOSS (Zona Selamat Sekolah) dan Paku Marka)	Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
220	Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam PAUD	Jl. Mulawarman I RT. 001,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
221	Pembangunan gedung perpustakaan desa	Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun,	Jumlah gedung yang di bangun	1 Unit	
222	Pekerjaan Sederhana tidak menambah Aset (Pembersihan Rumputsemak belukargulma,sedimentasi lumpur)	Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
223	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Desa	Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun ,	Panjang saluran yang di normalisasi	200 M	

224	Ruang Terbuka Non Hijau di perkotaan (Paving, RabatSemenisasi)	Jl. H.M Aini H RT. 011 - 016 Desa Kota Bangun Ulu ,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
225	Pembangunan Turap Desa dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Kota Bangun	Jl. H.M Aini H RT. 016,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
226	Penyediaan Alat Kesenian	Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun ,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
227	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Jl. Sri Bangun RT. 021 Gang Nangka 7 Dusun Melati,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
228	Fasilitasi sarana prasarana desa	Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun ,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
229	Peningkatanpemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Desa	Jl. H.M Aini H RT. 014,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
230	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jl. H.M Aini H RT. 015 - 016,			
231	Operasi dan pemeliharaan sistem drainase Pembangunan sistem drainase perkotaan Dengan Lebar Saluran Lebih Dari 2-4 Meter	Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun,	Panjang saluran yang di normalisasi	200 M	
232	Peningkatanpemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Desa	JL HASBULAH HASYARI RT 02,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
233	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Jl. Awang Long RT. 001 Dusun Beringin,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
234	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Jl. P. Suta Kanan RT. 001 Dusun Beringin,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
235	Ruang Terbuka Non Hijau di perkotaan (Paving, RabatSemenisasi)	Jl. P. Suta Kanan RT. 002 Dusun Beringin,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
236	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Jl. Awang Long RT. 001 Dusun Beringin,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
237	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Jl. P. Suta Kanan RT. 010 Dusun Cempaka,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
238	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Jl. Awang Long RT. 007 Dusun Teratai,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
239	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	RT. 010 Dusun Cempaka,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
240	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Kota Bangun	RT. 007 Dusun Teratai,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
241	Peningkatanpemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Desa	Jl. H.M Aini H RT. 011,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
242	Rehabilitasi SedangBerat GedungRuang KelasRuang Guru PAUD	RT. 007 Dusun Teratai,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
243	Peningkatanpemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Desa	Jl. H.M Aini H RT. 014,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
244	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Jl. H.M Aini H RT. 017,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
245	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	Jl. P. Suta Kanan RT. 006 Dusun Teratai,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	

246	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	Jl. P. Suta Kanan RT. 009 Dusun Cempaka,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
247	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Jl. Sri Bangun RT. 020,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
248	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	RT. 001 Dusun Beringin,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
249	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Kota Bangun	Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun,	Panjang Gorong gorong yang di bangun	200 M	
250	Peningkatanpemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Desa	Jl. P. Suta Kanan RT. 003 Dusun Beringin,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
251	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Jl Awang long RT 10,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
252	Fasilitasi Organisasi keolahragaan	Desa Muhuran RT.004,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
253	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Desa Muhuran Seberang,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
254	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Dusun Beringin,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
255	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Dusun Teratai,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
256	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Dusun Cempaka,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
257	Ruang Terbuka Non Hijau di perkotaan (Paving, RabatSemenisasi)	Jl. P. Suta Kanan RT. 002 Dusun Beringin,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
258	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Desa Liang Ulu,	jumlah unit yang disediakan	1 Unit	
259	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jl. M. Siddiq RT. 017,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
260	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jl. Mulawarman I RT. 001,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
261	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jl. M. Siddiq RT. 017,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
262	Rehabilitasi Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	RT. 008 Dusun Cempaka,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
263	Rehabilitasi SedangBerat GedungRuang KelasRuang Guru PAUD	Jl. P. Suta Kanan RT. 002 Dusun Beringin,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
264	Rehabilitasi SedangBerat GedungRuang KelasRuang Guru PAUD	Jl. P. Suta Kanan RT. 006 Dusun Teratai,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
265	Rehabilitasi SedangBerat GedungRuang KelasRuang Guru PAUD	RT. 008 Dusun Cempaka,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
266	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa dengan kontruksi Sederhana	Jl. H.M Aini H RT. 016,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
267	Ruang Terbuka Non Hijau di perkotaan (Paving, RabatSemenisasi)	RT. 008 Dusun Cempaka,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	

268	Ruang Terbuka Non Hijau di perkotaan (Paving, RabatSemenisasi)	RT. 008 Dusun Cempaka,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
269	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jl. M. Siddik, RT.017 No.116,	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
270	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Mesin Pompa, Selang, Nozle, Conection, baju tahan panas, sepatu, helm) (Karhutla)	Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun,	jumlah paket yang disediakan	1 Paket	
271	Pengadaan Mebel PAUD (Pengadaan Meja kursi Guru, Meja kursi Siswa, Lemari rak buku, lemari file,)	Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun ,	jumlah paket yang disediakan	1 Paket	
272	Pembekalan Barista	Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun,	jumlah paket yang disediakan	1 Paket	
273	Pembangunanpeningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Jalan Panglima Suta Kanan RT 008 Desa Liang,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
274	Pembangunanpeningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Jalan Panglima Suta Kanan RT 009 Desa Liang Ilir,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
275	Pembangunanpeningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Jalan Panglima Suta Kanan RT 010 Desa Liang Ilir,	Panjang jalan yang di bangun	200 M	
276	Hibah Kepada badanlembagaormas yang berbadan hukum	RT 07 Desa kota bangun ilir, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
277	Penyediaan Sarana dan Prasarana SDSMP	Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun, Provinsi Kalimantan Timur	jumlah paket yang disediakan	1 Paket	
278	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Rawa Kewenangan KabupatenKota (Luasnya dibawah 1000 Ha)	Jl. Sri Bangun, RT. 020 (Kanal Samping ex. Lapangan Pesawat), Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
279	Penyediaan Sarana dan Prasarana SDSMP	JL AWANG LONG RT 10, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Paket yang disediakan	1 Paket	
280	Penyediaan Mesin dan Peralatan Industri Kecil Menengah	Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun, Provinsi Kalimantan Timur	jumlah paket yang disediakan	1 Paket	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran harus dilakukan sehingga perlu Dokumen Perencanaan yang disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sehingga terwujudnya penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

1. Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumber daya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah.
2. Meningkatkan sarana infrastruktur sebagai akses masyarakat dalam kehidupan sehari-hari

b. Sasaran

1. Meningkatnya tertib administrasi pemerintah dan kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya Interkoneksitas antar wilayah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan dibuat dengan menyesuaikan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang lebih prioritas untuk dilaksanakan terutama permasalahan Bidang Ekonomi, bidang Sosial Budaya, bidang sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dari 11 desa di kecamatan Kota Bangun Adapun secara detail Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 kecamatan Kota Bangun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel TC 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kecamatan Kota Bangun

Kode					Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP**	**Kota Bangun**	**100**	**1,530,343,000**	APBD		**100**	**1,530,343,000**
						Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	**Kota Bangun**	**88.10**	**5,640,000,000**	APBD		**88.10**	**5,640,000,000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif**	**Kota Bangun**	**3**	**400,000,000**	APBD		**3**	400,000,000
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaadan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Bangun	5	150,000,000	APBD		5	150,000,000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bangun	5	250,000,000	APBD		5	250,000,000
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi**	**Kota Bangun**	**2**	**100,000,000**	APBD		**2**	100,000,000
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kota Bangun	4	-	APBD		4	-
7	01	02	2	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bangun	2	100,000,000			2	100,000,000

7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Kota Bangun**	**0**	-	APBD		**0**	-
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kota Bangun	2	-	APBD		2	-
7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Kota Bangun	4	-	APBD		4	-
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat**	**Kota Bangun**	**2**	**6,670,343,000**	APBD		**2**	6,670,343,000
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kota Bangun	4	-	APBD		4	-
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kota Bangun	2	1,030,343,000	APBD		2	1,030,343,000
7	**01**	**03**	**2.01**		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Bangun	2	5,640,000,000	APBD		7	5,640,000,000
7	**01**	**03**	**2.01**	**02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif**	**Kota Bangun**	**60**	**586,000,000**	APBD		**4**	586,000,000
7	01	03	2.01	03	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan**	**Kota Bangun**	**33**	**100,000,000**	APBD		**4**	100,000,000
7	01	02	2.04	02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kota Bangun	7	50,000,000	APBD		55	50,000,000
7	01	02	2.04	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kota Bangun	1		APBD		5	

7	01	02	2.04	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bangun	3	50,000,000	APBD		50	50,000,000
7	01	03	2		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang fasilitasi	Kota Bangun	3	486,000,000			11	486,000,000
7	01	03	2	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kota Bangun	4	486,000,000	APBD		11	486,000,000
7	**01**	**03**	**2.02**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan**	**Kota Bangun**	**75**	**175,000,000**	APBD		**67**	175,000,000
7	01	03	2.02	01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kota Bangun**	**2**	**175,000,000**	APBD		**11**	175,000,000
7	**01**	**03**	**2.02**	**02**	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Bangun	2		APBD		3	
7	01	03	2.02	03	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kota Bangun	2	175,000,000	APBD		5	175,000,000
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	**Kota Bangun**	**4**	-	APBD		**5**	-
7	**01**	**04**	**2.02**	**01**	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kota Bangun	4		APBD		5	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kota Bangun**	**55**	**215,000,000**	APBD		**5**	355,000,000
7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan**	***Kota Bangun***	**5**	**215,000,000**	APBD		**4**	355,000,000
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Kota Bangun*	50	210,000,000	APBD		15	345,000,000

7	**01**	**05**	**2.01**	**08**	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Bangun	2	5,000,000	APBD		1	10,000,000
7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik**	**Kota Bangun**	**71.42**	**5,000,000**	APBD		**1**	5,000,000
7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa Yang difasilitasi**	**Kota Bangun**	**11**	**5,000,000**	APBD		**12**	5,000,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kota Bangun	11	-	APBD		40	-
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kota Bangun	11	5,000,000	APBD		1	5,000,000
x	xx	01.			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Kota Bangun**	**67**	**7,279,154,942**	APBD		**2**	9,111,932,626
x	xx	01.	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Bangun**	**11**	**605,000,000**	APBD		**18**	455,967,377
x	xx	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bangun	3	140,000,000	APBD		1	50,000,000
x	xx	01.	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bangun	5	5,000,000	APBD		1	5,000,000
x	xx	01.	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bangun	5	5,000,000	APBD		1	5,000,000
x	xx	01.	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Bangun	5		APBD		20	
x	xx	01.	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Bangun	5	-	APBD		1	-

X	**XX**	**01.**	**2.01**	**06**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bangun	4	70,000,000	APBD		5	10,967,377
X	XX	01.	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bangun	4	60,000,000	APBD		5	60,000,000
7	01	01	2	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kota Bangun	200	300,000,000			10	300,000,000
7	01	01	2	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bangun	1	25,000,000			12	25,000,000
X	XX	01.	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**Kota Bangun**	**15**	**4,536,966,701**	APBD		**1**	5,576,840,808
X	XX	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bangun	35	4,406,966,701	APBD		12	5,395,840,808
X	XX	01.	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bangun	2	25,000,000	APBD		4	6,000,000
X	**XX**	**01.**	**2.02**	**07**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bangun	12	80,000,000	APBD		6	150,000,000
X	XX	01.	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bangun	2	25,000,000	APBD		10	25,000,000
X	XX	01.	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan**	**Kota Bangun**	**575**	**272,278,712**	APBD		**10**	122,278,712

x	xx	01.	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bangun	1	25,000,000	APBD		1	25,000,000
x	xx	01.	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bangun	1	150,000,000	APBD		1	-
x	xx	01.	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bangun	1	50,000,000	APBD		1	50,000,000
x	xx	01.	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bangun	1		APBD		1	
x	xx	01.	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bangun	12	47,278,712	APBD		12	47,278,712
x	**xx**	**01.**	**2.03**	**06**	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bangun	2		APBD		2	
x	xx	01.	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bangun	1		APBD		1	
x	xx	01.	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**Kota Bangun**	**40**	**32,000,000**	APBD		**40**	62,000,000
x	xx	01.	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Bangun	2	-	APBD		2	-
x	xx	01.	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bangun	1	32,000,000	APBD		1	62,000,000
x	xx	01.	2.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Kota Bangun	1	-	APBD		1	-
x	xx	01.	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bangun	5	-	APBD		5	-
x	**xx**	**01.**	**2.05**	**10**	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bangun	5	-	APBD		5	-
x	xx	01.	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bangun	5	-	APBD		5	-

X	XX	01.	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia**	**Kota Bangun**	**8**	**240,500,000**	APBD		**8**	740,500,000
X	XX	01.	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bangun	1	-	APBD		1	-
X	XX	01.	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bangun	2	25,000,000	APBD		2	200,000,000
X	XX	01.	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bangun	1	10,500,000	APBD		1	20,500,000
X	XX	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bangun	1	20,000,000	APBD		1	85,000,000
7	01	01	2.1	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bangun	1	25,000,000	APBD		1	50,000,000
X	XX	01.	2.06	07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bangun		10,000,000	APBD			20,000,000
7	01	01	2.1	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bangun	30	125,000,000	APBD		30	315,000,000
X	XX	01.	2.06	08	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bangun	100	25,000,000	APBD		100	50,000,000
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Bangun	2	-	APBD		2	-
X	XX	01.	2.06	09	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**Kota Bangun**	**18**	**607,000,000**	APBD		**18**	687,000,000
X	XX	01.	2.06	10	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Bangun	1	100,000,000	APBD		2	180,000,000
X	XX	01.	2.06	10	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Bangun	1	-	APBD		1	-
X	XX	01.	2.06	11	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Kota Bangun	1	-	APBD		1	-
X	XX	01	2.07		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Kota Bangun	20	-	APBD		20	-

x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Bangun	1	-	APBD		1	-
x	xx	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Bangun	5	507,000,000	APBD		5	507,000,000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**Kota Bangun**	**12**	**759,251,364**	APBD		**12**	1,173,687,564
x	xx	01	2.07	11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bangun	1	2,000,000	APBD		1	3,000,000
x	xx	01.	2.08		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bangun	12	402,560,000	APBD		12	702,560,000
x	xx	01.	2.08	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bangun	12	354,691,364	APBD		12	468,127,564
x	xx	01.	2.08	02	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara**	**Kota Bangun**	**509**	**226,158,165**	APBD		**509**	293,658,165
x	xx	01.	2.08	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bangun	3	50,000,000	APBD		3	15,000,000
x	xx	01.	2.08	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bangun	4	173,658,165	APBD		4	273,658,165
x	xx	01.	2.09	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Bangun	10	2,500,000	APBD		1	5,000,000
x	xx	01.	2.09	04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	Kota Bangun	6	-	APBD		6	-
x	xx	01.	2.09	05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Bangun	10		APBD		10	
x	xx	01.	2.09	06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Bangun	10		APBD		10	
									15,430,497,942				**17,403,275,626**

BAB V
PENUTUP

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Tahun Anggaran 2025 ini dapat disusun. Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Kantor Camat Kota bangun dalam Tahun 2025, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan pembuatan Renja yang memberikan informasi tentang pelaksanaan urusan Desentralisasi dan pelaksanaan tugas pemerintah secara umum.Penilaian terhadap pelaksanaan beberapa urusan tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap capaian indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.
Berdasarkan hasil pembuatan Renja ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kegiatan-kegiatan yang ada pada Kantor Camat Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2025 baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif sesuai dengan program / kegiatan yang ada.
Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia yang handal, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance* di lingkungan Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.
Rencana Tindak Lanjut Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Kota Bangun Tahun 2O25 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Renja Kecamatan Kota Bangun Tahun 2O25 ditetapkan 6 Program, 11 Kegiatan dengan nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan APBD Tahun 2O24. Termasuk di dalamnya pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kecamatan meliputi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Drainase yang tersebar pada 11 Desa.

Beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan perlu di tindak lanjuti sebagaimana program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Kota Bangun diantaranya permasalahan pengembangan wisata dan pertanian.

Semoga keberadaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kota Bangun ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Bupati terpilih

aaa.RENJA KECAMATAN MUARA WIS

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja OPD atau selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja OPD disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Muara Wis secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan Sumber Daya Manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Muara Wis menyusun Renja OPD Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Wis. Renja Kecamatan Muara Wis Tahun 2025 mengacu pada RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)

Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9 Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10 Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

14 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

15 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

16 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini adalah Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Muara Wis selama tahun 2025 dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD dan Renstra Kecamatan.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah untuk Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Camat Muara Wis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Kantor Camat Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daeah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana Tindak Lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi anggaran Perangkat Daerah yang mencakup program, kegiatan sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Muara Wis Tahun 2023 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Muara Wis Tahun 2023 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Kecamatan Muara Wis Tahun 2024 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Muara Wis Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Muara Wis Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN

PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN MUARA WIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	Urusan Kewilayaan									
7.01	Urusan Kecamatan									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	80	62	NA	NA	63	NA	NA
7.01.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana,anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50	10	10	10	100	10	30	60,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	2	2	2	100	2	6	60,00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	1	1	1	100	1	3	60,00
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	1	1	1	100	1	3	60,00
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	1	1	1	100	1	3	60,00

7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	1	1	1	100	1	3	60,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	2	4	4	100	2	8	80,00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	2	4	4	100	2	8	80,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	150	30	30	30	100	30	90	60,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155	31	31	31	100	31	93	60,00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1	1	1	100	1	3	60,00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	65	13	13	13	100	13	39	60,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	80	16	16	16	100	16	48	60,00
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20	4	4	4	100	4	12	60,00
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	12	12	12	100	12	36	60,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	155	31	31	31	100	31	93	60,00
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	150	0	50	50	100	0	50	33,33
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	43	5	8	8	100	10	23	53,49

		Pendidikan dan Pelatihan								
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	155	31	31	31	100	33	95	61,29
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	155	31	31	31	100	33	95	61,29
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	50	10	10	10	100	10	30	60,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga Bangunan Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	100	1	3	60,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	100	1	3	60,00
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	1	1	1	100	1	3	60,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	2	2	2	100	2	6	60,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	2	2	2	100	2	6	60,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	1	1	1	100	1	3	60,00
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	12	12	12	100	12	36	60,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	12	12	12	100	12	36	60,00
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	1	1	1	100	1	3	60,00
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	0	1	1	100	1	2	50,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	275	55	55	55	100	55	165	60,00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50	5	5	13	260	0	18	36,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	250	50	50	50	100	50	150	60,00

7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25	5	5	5	100	5	15	60,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	12	12	12	100	12	36	60,00
7.01.01.2.05.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60,00
7.01.01.2.05.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	160	64	64	64	100	63	191	119,38
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50	10	10	10	100	10	30	60,00
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara					#DIV/0!		0	#DIV/0!
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	20	20	20	100	20	60	60,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	2	2	2	100	2	6	60,00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi								
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan								

	Wilayah Kecamatan	Minimal di Wilayah Kecamatan								
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	10	2	2	2	100	2	6	60,00
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	60	12	12	12	100	12	36	60,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60	12	12	12	100	12	36	60,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	10	2	2	2	100	2	6	60,00
7.01.02.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25	5	5	5	100	5	15	60,00
7.01.02.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	2	2	2	100	2	6	60,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	10	2	2	2	100	2	6	60,00
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	20	4	4	4	100	4	12	60,00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	1	1	1	100	1	3	60,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35	7	7	7	100	7	21	60,00

7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	35	7	7	7	100	7	21	60,00
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5	1	1	1	100	1	3	60,00
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10	2	2	2	100	2	6	60,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Muara Wis sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Muara Wis berdasarkan indikator kinerja sasaran akan disampaikan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Muara Wis

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa			5	5,5	6	6,5	195,09	-7,2	6	6,5	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dalam pasal 126 menerangkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagaian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan juga merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati / Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Muara Wis berpedoman kepada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan. Yaitu disebutkan dalam Pasal 3 bahwa Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Selanjutnya mengenai fungsi diuraikan pada pasal berikutnya yaitu di pasal 4 yang berbunyi Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya menyelenggarakan fungsi:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;

8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

Adapun isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD diuraikan sebagai berikut:

a. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah adalah :
    1) Peningkatan Sumber Daya Manusia serta adanya pemerataan SDM yang berkualitas di setiap OPD/ bagian-bagian dalam OPD sehingga pelaksanaan tugas-tugas dapat dikerjakan secara lebih efektif dan efisien. Kecamatan Muara Wis dalam hal ini melaksanakan pembinaan kepada perangkat desa secara teratur, rapat koordinasi Kepala Desa dan Instansi di wilayah Kecamatan Muara Wis, untuk melaksanakan koordinasi serta meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;
    2) Optimalisasi partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan, terutama pada pembangunan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah:
    1) Masih kurangnya jumlah SDM yang profesional di Kecamatan Muara Wis sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan secara efektif dan efisien;
    2) Belum maksimalnya sarana dan prasarana kantor;
    3) Belum tertibnya pengelolaan arsip kantor;
    4) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum;
    5) Kurangnya kerjasama dan partisipasi masyarakat luas dan stakeholder terkait yang mengakibatkan kurang maksimalnya pencapaian pelaksanaan kegiatan.

c. Dampak pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional.

Visi dan Misi Kepala Daerah mempunyai dampak terhadap kesehjahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup masyarakat.

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

1) Kurang maksimalnya SDM di Kantor Kecamatan Muara Wis sehingga mempengaruhi kinerja Kecamatan Muara Wis;
2) Kurangnya pemahaman dan kepatuhan aparatur terhadap peraturan perundang-undangan sehingga berpengaruh terhadap kedisiplinan dan kinerja aparatur;
3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum maupun partisipasi pembangunan;
4) Kurangnya kerjasama dengan stakeholder dan masyarakat luas dalam pelaksanaan kegiatan sehingga pencapaian hasil/target kegiatan kurang maksimal.

e. Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

1) Peningkatan Sistem Pelayanan, Teknologi dan Informasi sehingga mempermudah akses dari dan ke masyarakat luas dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.
2) Mengoptimalisasi pembinaan dan kerjasama antar desa sehingga terdapat kerjasama yang sinergis dan saling menguntungkan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktifitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Wis serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Muara Wis disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/melibatkan partisipasi masyarakat melalui forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Muara Wis diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

Adapun review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 akan kami sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel. T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Perangkat Daerah : Kecamatan Muara Wis

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN					KECAMATAN					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	2.220.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	3.109.702.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	0 kegiatan	-	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	0 kegiatan	400.000.000	
01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Muara Wis	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	-	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Muara Wis	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	150.000.000	Anggaran untuk penanganan stunting
02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Muara Wis	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Muara Wis	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	250.000.000	Anggaran untuk fasilitasi HUT RI
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah		Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	1 SPM	20.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah		Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	1 SPM	120.000.000	

	yang Ada di Kecamatan					yang Ada di Kecamatan					
02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Muara Wis	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	20.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Muara Wis	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	20.000.000	
03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Wis	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	Laporan	-	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Wis	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	100.000.000	Anggaran untuk penangan an stunting
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2	Kegiatan	2.200.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2 Kegiatan	2.589.702.000	
02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Muara Wis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1	Laporan	200.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Muara Wis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	789.702.000	
03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10	Laporan	2.000.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9 Laporan	1.800.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100	Persen	250.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100 Persen	586.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	2	Kegiatan	250.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	100.000.000	
01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Muara Wis	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Muara Wis	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	
03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Wis	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	200.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Wis	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	50.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	0	Kegiatan	-	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	5 Kegiatan	486.000.000	

			Kecamatan					Kecamatan				
01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Muara Wis	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Muara Wis	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	486.000.000	Anggaran untuk fasilitasi kegiatan lembaga di tingkat kecamatan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100	persen	-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100	persen	175.000.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Kegiatan	-	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Kegiatan	175.000.000	
02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Muara Wis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	Laporan	-	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Muara Wis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	Laporan	175.000.000	Anggaran untuk fasilitasi kegiatan keagamaan di tingkat kecamatan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	Persen	275.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	Persen	170.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	16	Kegiatan	275.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	16	Kegiatan	170.000.000	
04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan	Muara Wis	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan	200	Orang	250.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan	Muara Wis	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan	50	Orang	170.000.000	

	Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional		Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional		Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B Nilai	7.244.813.220	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B Nilai	9.161.871.909	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 dokumen	150.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 dokumen	605.000.000	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muara Wis	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muara Wis	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	140.000.000	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	70.000.000	
07	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Muara Wis	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Wis	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	60.000.000	
09	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	Muara Wis	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	-	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	Muara Wis	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	300.000.000	Anggaran untuk pusat data kecamatan

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
10	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mura Wis	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Laporan	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mura Wis	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Laporan	25.000.000	Anggaran untuk forum OPD tingkat Kabupaten
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	20 laporan	3.995.987.114	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	20 laporan	4.799.845.803	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mura Wis	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	372 Orang/bulan	3.897.467.114	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mura Wis	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	372 Orang/bulan	4.666.325.803	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mura Wis	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mura Wis	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mura Wis	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	83.520.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mura Wis	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	83.520.000	
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Mura Wis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Mura Wis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000	Anggaran untuk penyusunan laporan prognosis dan realisasi anggaran
	Administrasi Barang Milik		Jumlah Dokumen Barang	16 unit		Administrasi Barang Milik		Jumlah Dokumen Barang	16 unit		

	Daerah pada Perangkat Daerah		Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan		70.800.000	Daerah pada Perangkat Daerah		Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan		255.000.000	
01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Muara Wis	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Muara Wis	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Anggaran untuk laporan kebutuhan barang
02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	150.000.000	Anggaran untuk pengamanan aset
04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	-	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000	
05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	30.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	30.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	50 orang	200.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	50 orang	200.000.000	
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Muara Wis	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	50.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Muara Wis	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	50.000.000	
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Muara Wis	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Muara Wis	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000	
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Muara Wis	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Muara Wis	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	50.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 jenis	703.039.578	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 jenis	703.039.578	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Muara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	1 Paket	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Muara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	1 Paket	7.500.000	

	Bangunan Kantor	Wis	Bangunan Kantor yang Disediakan			Bangunan Kantor	Wis	Bangunan Kantor yang Disediakan			
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mura Wis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	34.539.578	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mura Wis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	34.539.578	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mura Wis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mura Wis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	50.000.000	
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Mura Wis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	8.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Mura Wis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	8.000.000	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Mura Wis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8	Dokumen	8.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Mura Wis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dokumen	8.000.000	
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mura Wis	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	Laporan	120.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mura Wis	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	Laporan	120.000.000	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mura Wis	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	375.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mura Wis	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	375.000.000	
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mura Wis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mura Wis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	50.000.000	
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Mura Wis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	50.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Mura Wis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	50.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	60	unit	1.100.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	60	unit	1.574.000.000	
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mura Wis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	300.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mura Wis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	300.000.000	
09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mura Wis	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	800.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mura Wis	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	1.274.000.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	bulan	554.986.528	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	bulan	554.986.528	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mura Wis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mura Wis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	5.000.000	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mura Wis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	284.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mura Wis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	284.400.000	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mura Wis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	265.586.528	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mura Wis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	265.586.528	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	47	unit	470.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	47	unit	470.000.000	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mura Wis	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mura Wis	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	150.000.000	
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mura Wis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mura Wis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	20.000.000	
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mura Wis	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mura Wis	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	300.000.000	
						10.439.813.220						13.202.573.909	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan mempertimbangkan hasil MUSRENBANG mulai tingkat Desa/Kelurahan yang ditindaklanjuti dengan MUSRENBANG Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten, responsive terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan.

Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan Perangkat Daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada dimasyarakat khususnya terkait dengan pelayanan kepada masyarakat sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan Forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil MUSRENBANG di Kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan OPD Kecamatan Muara Wis, seperti yang tersaji dalam Tabel dibawah ini :

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Muara Wis

NO	KAMUS USULAN	PERMASALAHAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Wis	Belum adanya Jalan Kayu Ulin Para Petani dan pekebun dalam mengelola Lahan (Grop Kelompok Tani Bapak Jumadi)	Lebak Mantan	Panjang Jalan		-
2	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Wis	Belum adanya Semenisasi Jalan Usaha Tani RT 01 Dsn Tanah Harapan (Jalan Ke Tanggul)	Lebak Mantan	Panjang Jalan		-
3	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Wis	Belum Adanya Akses Jalan Yang Memadai	Enggelam	Panjang Jalan		-
4	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Wis	Perlunya Semenisasi Atas Jembatan, karena jembatan banyak rusak /berlubang	Enggelam	Panjang Jalan		-
5	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Wis	Belum adanya pengerukan sungai ebos yang sangam menunjang usaha ekonomi masyarakat Nelayan	Sebemban	Panjang Drainase		-
6	Pekerjaan Sederhana tidak menambah Aset (Pembersihan Rumput/semak belukar/gulma,sedimentasi lumpur) Di Kecamatan Muara Wis	Belum terpenuhinya pembersihan Rumput perkebungan warga	Sebemban	Luas Rumput/semak belukar/gulma,sedimentasi lumpur		-
7	Pembangunan dan Perbaikan MCK Umum/Komunal Kecamatan Muara Wis	Belum terpenuhinya Pembangunan dan Perbaikan MCk umum desa Sebemban dan Ds Kuyung	Sebemban	Jumlah Unit		-
8	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Wis	Belum terpenuhinya Semenisasi jalan Lingkungan RT. 005	Sebemban	Panjang Jalan		-
9	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan Muara Wis	Belum bedjalannya pendistribusian Air bersih di Desa Sebemban	Sebemban	Panjang Jaringan		-
10	Pembangunan Pos Keamanan di Kecamatan Muara Wis	Belum terbangunannya pos keamanan di masing-masing RT. 008	Sebemban	Jumlah Unit		-

11	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Muara Wis	Perlu adanya Pengecatan ulang Kantor Desa Sebemban	Sebemban	Jumlah Unit		-
12	Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) di Kecamatan Muara Wis	Perlu adanya rehab Dinding TPA Al-Amin	Sebemban	Jumlah Unit		-
13	Pemeliharaan Penerangan Bangunan di Kecamatan Muara Wis	Belum terpenuhinya pemeliharaan penerangan yang secara maksimal	Sebemban	Jumlah Unit		-
14	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Wis	Belum adanya Seminisasi Jln. Botoh Abdullah Desa Sebemban	Sebemban	Panjang Jalan		-
15	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Wis	Belum secara maksimal peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan	Sebemban	Panjang Jalan		-
16	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Wis	Lanjutan semenisasi Jembatan RT. 007	Sebemban	Panjang Jalan		-
17	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Wis	Lanjutan semenisasi Jl. jembatan RT. 007	Sebemban	Panjang Jalan		-
18	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Wis	Belum adanya pembangunan gorong-gorong jembatan jalan poros ke dusun kuyung	Sebemban	Panjang Gorong-gorong		-
19	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Muara Wis	Belum adanya Sekretariat Karang Taruna (Ukuran 6 x 8 Meter)	Sebemban	Jumlah Unit		-
20	Pemeliharaan Penerangan Bangunan di Kecamatan Muara Wis	Batrai PLTS Sudah mulai lemah	Muara Enggelam	Jumlah Unit		-
21	Pembuatan Tempat Sampah Penampungan Sementara di Kecamatan Muara Wis	Belum secara keseluruhan Bak Smaph tersedia di Desa Sebembam dan Ds Kuyung	Sebemban	Jumlah Unit		-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAEAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen rencana pembanguan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembanguan nasional sebagai mana diatur dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 merupakan RPJMD Keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 – 2025. Oleh sebab itu penyusunana RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara masa bakti tahun 2021 – 2026, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 - 2025 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 tahun 2010 tentang RPJPD.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daearah (RPJMD) merupakan dok perencanaan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, RPJMD merupakan Penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati dan arah kebijakan keuangan daerah.

RPJMD tersebut digunakan sebagai pedomam dalam Penyusunan RPKD, yang merupakan Rencana Pembangunan tahunan daerah, serta memuat prioritas pembanguan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal , serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di kabupaten Kutai Kartanegara, maka Visi yang hendak dicapai dalan Priode 2021 – 2026 adalah :

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dijabarkan kembali kedalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkam dalam Renja Kecamatan. Maka untuk itu Tujuan strategis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 adalah sebagai berikut :"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel"

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kurtai Kartanegara Tahun 2025 adalah : "Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan"

Tabel 3.1

Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel		Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Kecamatan Muara Wis merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Muara Wis sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

A. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

   1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah.

      Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Muara Wis diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Muara Wis merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

   2) Pencapaian SPM.

      Standar Pelayanan Minimal di Kecamatan Muara Wis belum terlaksana, sehingga perlu dimasukan program dan kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian SPM di Kecamatan Muara Wis.

B. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegitan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:

   1) Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan.

      Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Muara Wis Tahun 2025 adalah 5 Program dengan 15 Kegiatan dan 46 sub kegiatan.

   2) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan.

      Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Muara Wis sifat

penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Muara Wis dan melingkupi semua Desa.

3) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Renja Kecamatan Muara Wis sebesar Rp.13.202.573.909,00.

C. Tabel rencana program dan kegiatan sebagaimana table berikut ini:

Tabel. T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Perangkat Daerah : Kecamatan Muara Wis

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
						UNSUR KEWILAYAHAN										
						KECAMATAN										
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP		100	Persen	3.109.702.000			100	Persen	2.220.000.000
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif		0	kegiatan	400.000.000			0	kegiatan	-
7	01	02	2.01	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Muara Wis	2	Laporan	150.000.000	Anggaran untuk penanganan stunting	Muara Wis	0	Laporan	-
7	01	02	2.01	02	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Muara Wis	1	Dokumen	250.000.000	Anggaran untuk fasilitasi HUT RI	Muara Wis	0	Dokumen	-
7	0	02	2.0			Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Standar Pelayanan		1	SPM				1	SPM	

	1		2			Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Minimal (SPM) yang difasilitasi				120.000.000					20.000.000
7	01	02	2.02	02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Muara Wis	1	Laporan	20.000.000		Muara Wis	1	Laporan	20.000.000
7	01	02	2.02	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Wis	2	Laporan	100.000.000	Anggaran untuk penangan an stunting	Muara Wis	0	Laporan	-
7	01	02	2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat		2	Kegiatan	2.589.702.000			2	Kegiatan	2.200.000.000
7	01	02	2.04	02	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Muara Wis	4	Laporan	789.702.000		Muara Wis	1	Laporan	200.000.000
7	01	02	2.04	03	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	9	Laporan	1.800.000.000		Muara Wis	10	Laporan	2.000.000.000
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan		100	Persen	586.000.000			100	Persen	250.000.000
7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan		2	Kegiatan	100.000.000			2	Kegiatan	250.000.000
7	01	03	2.01	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Muara Wis	5	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000		Muara Wis	5	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000
7	01	03	2.01	03	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Wis	2	Laporan	50.000.000		Muara Wis	2	Laporan	200.000.000
7	0	03	2.0			Pemberdayaan Lembaga	Jumlah kegiatan		5	Kegiatan				0	Kegiatan	

	1		1			Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				486.000.000					-
7	01	03	2.01	01	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Muara Wis	5	Lembaga Kemasyarakatan	486.000.000	Anggaran untuk fasilitasi kegiatan lembaga di tingkat kecamatan	Muara Wis	0	Lembaga Kemasyarakatan	-
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan		100	persen	175.000.000			100	persen	-
7	01	04	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1	Kegiatan	175.000.000			1	Kegiatan	-
7	01	04	2.01	02	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Muara Wis	2	Laporan	175.000.000	Anggaran untuk fasilitasi kegiatan keagamaan di tingkat kecamatan	Muara Wis	0	Laporan	-
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		0	Persen	170.000.000			0	Persen	250.000.000
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah Urusan Pemerintahan yang		16	Kegiatan	170.000.000			16	Kegiatan	250.000.000

						Penugasan Kepala Daerah	dilaksanakan Kecamatan									
7	01	05	2.01	04	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Muara Wis	50	Orang	170.000.000		Muara Wis	200	Orang	250.000.000
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		100	Persen	-			100	Persen	450.000.000
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi		7	Desa	-			7	Desa	450.000.000
7	01	06	2.01	03	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Muara Wis	0	Dokumen	-		Muara Wis	7	Dokumen	100.000.000
7	01	06	2.01	11	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Muara Wis	0	Dokumen	-		Muara Wis	1	Dokumen	250.000.000
7	01	06	2.01	12	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Muara Wis	0	Dokumen	-		Muara Wis	2	Dokumen	100.000.000
7	01	01.				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		B	Nilai	9.161.871.909			B	Nilai	7.819.813.220
7	01	01.	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		22	dokumen	605.000.000			22	dokumen	475.000.000
7	01	01.	2.01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Muara Wis	3	Dokumen	140.000.000		Muara Wis	2	Dokumen	40.000.000

						Daerah	Daerah									
7	01	01.	2.01	02	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Muara Wis	1	Dokumen	5.000.000		Muara Wis	1	Dokumen	15.000.000
7	01	01.	2.01	03	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Muara Wis	1	Dokumen	5.000.000		Muara Wis	1	Dokumen	15.000.000
7	01	01.	2.01	06	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muara Wis	3	Laporan	70.000.000		Muara Wis	4	Laporan	50.000.000
7	01	01.	2.01	07	07	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Wis	2	Laporan	60.000.000		Muara Wis	1	Laporan	30.000.000
7	01	01.	2.01	06	09	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Muara Wis	2	Data	300.000.000	Anggaran untuk pusat data kecamatan	Muara Wis	0	Data	300.000.000
7	01	01.	2.01	07	10	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muara Wis	1	Laporan	25.000.000	Anggaran untuk forum OPD tingkat Kabupaten	Muara Wis	0	Laporan	25.000.000
7	01	01.	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		20	laporan	4.799.845.803			20	laporan	4.020.987.114
7	01	01.	2.02	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Muara Wis	372	Orang/bulan	4.666.325.803		Muara Wis	372	Orang/bulan	3.897.467.114

7	01	01.	2.02	05	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Muara Wis	1	Laporan	25.000.000		Muara Wis	1	Laporan	15.000.000
7	01	01.	2.02	07	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Muara Wis	13	Laporan	83.520.000		Muara Wis	18	Laporan	83.520.000
7	01	01.	2.02	08	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Muara Wis	1	Dokumen	25.000.000	Anggaran untuk penyusunan laporan prognosis dan realisasi anggaran	Muara Wis	0	Dokumen	25.000.000
7	01	01.	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan		16	unit	255.000.000			16	unit	295.800.000
7	01	01.	2.03	01	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Muara Wis	1	Dokumen	25.000.000	Anggaran untuk laporan kebutuhan barang	Muara Wis	0	Dokumen	25.000.000
7	01	01.	2.03	02	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Muara Wis	1	Dokumen	150.000.000	Anggaran untuk pengamanan aset	Muara Wis	0	Dokumen	150.000.000
7	01	01.	2.03	04	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Wis	1	Laporan	50.000.000		Muara Wis	0	Laporan	50.000.000
7	01	01.	2.03	05	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Muara Wis	4	Laporan	30.000.000		Muara Wis	4	Laporan	30.000.000

						Barang Milik Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD									
7	01	01.	2.03	06	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Wis	0	Laporan	-		Muara Wis	12	Laporan	40.800.000
7	01	01.	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian		50	orang	200.000.000			50	orang	200.000.000
7	01	01.	2.05	02	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Muara Wis	50	Paket	50.000.000		Muara Wis	50	Paket	50.000.000
7	01	01.	2.05	09	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Muara Wis	10	Orang	100.000.000		Muara Wis	10	Orang	100.000.000
7	01	01.	2.05	11	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Muara Wis	30	Orang	50.000.000		Muara Wis	50	Orang	50.000.000
7	01	01.	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah		8	jenis	703.039.578			8	jenis	703.039.578
7	01	01.	2.06	01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga Bangunan Kantor yang Disediakan	Muara Wis	1	Paket	7.500.000		Muara Wis	1	Paket	7.500.000
7	01	01.	2.06	02	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Muara Wis	1	Paket	34.539.578		Muara Wis	1	Paket	34.539.578
7	01	01.	2.06	04	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Muara Wis	2	Paket	50.000.000		Muara Wis	2	Paket	50.000.000
7	01	01.	2.06	05	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Muara Wis	2	Paket	8.000.000		Muara Wis	2	Paket	8.000.000
7	01	01.	2.06	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Muara Wis	4	Dokumen	8.000.000		Muara Wis	8	Dokumen	8.000.000
7	01	01.	2.06	08	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Muara Wis	6	Laporan	120.000.000		Muara Wis	6	Laporan	120.000.000

7	01	01.	2.06	09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muara Wis	12	Laporan	375.000.000		Muara Wis	12	Laporan	375.000.000
7	01	01.	2.06	10	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Muara Wis	1	Dokumen	50.000.000		Muara Wis	1	Dokumen	50.000.000
7	01	01.	2.06	11	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Muara Wis	1	Dokumen	50.000.000		Muara Wis	1	Dokumen	50.000.000
7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan		60	unit	1.574.000.000			60	unit	1.100.000.000
7	01	01	2.07	06	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Muara Wis	20	Unit	300.000.000		Muara Wis	20	Unit	300.000.000
7	01	01	2.07	09	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Muara Wis	5	Unit	1.274.000.000		Muara Wis	4	Unit	800.000.000
7	01	01.	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12	bulan	554.986.528			12	bulan	554.986.528
7	01	01.	2.08	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muara Wis	1	Laporan	5.000.000		Muara Wis	12	Laporan	5.000.000
7	01	01.	2.08	02	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Muara Wis	12	Laporan	284.400.000		Muara Wis	12	Laporan	284.400.000
7	01	01.	2.08	04	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Muara Wis	12	Laporan	265.586.528		Muara Wis	12	Laporan	265.586.528
7	01	01.	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		47	unit	470.000.000			47	unit	470.000.000
7	01	01.	2.09	02	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Muara Wis	6	Unit	150.000.000		Muara Wis	6	Unit	150.000.000

						Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya									
7	01	01.	2.09	06	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Muara Wis	20	Unit	20.000.000		Muara Wis	20	Unit	20.000.000
7	01	01.	2.09	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Muara Wis	2	Unit	300.000.000		Muara Wis	2	Unit	300.000.000
											13.202.573.909					10.989.813.220

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Wis Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Wis Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Wis yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Muara Wis.

Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kecamatan Muara Wis berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Wis Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025. Kecamatan Muara Wis berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Muara Wis Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Muara Wis Tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Muara Wis Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Wis selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Muara Wis. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Muara Wis Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Kecamatan Muara Wis juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan Renja Kecamatan Muara Wis ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi

Kecamatan Muara Wis serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

bbb.RENJA KECAMATAN MUARA MUNTAI

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya berupa dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra).

Kecamatan Muara Muntai dipakai sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Muntai yang selanjutnya akan dipakai sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Muara Muntai. Muatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome.*

Rencana Kerja Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari:

a. Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu;
b. Rumusan status kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini;
c. Rumusan peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan Renja;
d. Rumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan;
e. pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana;

f. rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja;
g. Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan;
h. prakiraan maju pendanaan untuk tahun berikutnya;
i. kejelasan siapa yang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran. Melalu pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan kerangka berfikir yang komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan melalui:

a. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan;
b. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur Pemerintah dan non pemerintah;
c. keterwakilan yang mewadai dari seluruh segmen masyarakat terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal;
d. berperan aktif pada pelaksanaan musrenbang RKPD dari segi penerapan perencanaan partisipatif;
e. Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan serta prioritas program.

Pendekatan politis, penyusunan Renja Kecamatan Muara Muntai mengacu pada RKPD dan RPJMD yang merupakan bentuk konsekuensi politis antara Bupati/Wakil Bupati terpilih. Pendekatan ini juga tercermin pada keterlibatan aktif DPRD dalam musrenbang Kecamatan dan kabupaten termasuk hasil sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD, kemudian dokumen RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan sampai RAPBD.

Pendekatan *top down*, perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui rapat koordinasi dan musrenbang mulai tingkat nasional, provinsi dan kabupaten juga tujuan *globalMDGs.* Pendekatan ini tercermin pada:

a. sinergi dengan program prioritas nasionaldan daerah;
b. konsisten pada RPJMD, RKPD dan Renstra Kecamatan Muara Muntai, Konsisten dengan dokumen RTRW daerah; dan

c. penanganan masalah dengan pendekatan holistic dan pendekatan sistem.

Pendekatan *bottom-up,* perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dan diselaraskan melalui musrenbang, konsisten terhadap visi misi RPJMD serta kesepakatan masyarakat tentang prioritas pembangunan dan hasil forum SKPD. Pada penyusunan Renja 2025 ini disesuaikan dengan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata CaraPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan Muara Muntai dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9 Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10 Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

14 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

15 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

16 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

   Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Muara Muntai selama tahun 2025 dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD dan Renstra Kecamatan.

2. Tujuan :

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Camat Muara Muntai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Kantor Camat Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD dan Renstra Perangkat Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN
- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Penyusunan dan Pelaksanaan Renja mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan serta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Adapun tugas pokok dan fungsi dari Kantor Kecamatan Muara Muntai adalah:

A. Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Fungsi Utama :
1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data *base* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan;
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasiltas pelayanan umum;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
10. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-

lembaga lainnya;

11. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan, pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan;
12. Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan serta Lembaga Kemasyarakatan.

C. Indikator Kinerja Utama

1. Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam dengan tujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangcam dengan formula:

$$\frac{\textit{Prosentase jumlah peserta musrenbang X 100}}{\textit{100 Jumlah usulan dalam musrenbang}}$$

2. Kelancaran Proses Pelayanan Administrasi Kecamatan, yang bertujuan untuk mengukur Indeks Kepuasaan Masyarakat, denganformula:

$$\frac{\textit{Prosentase jumlah Layanan X 100}}{\textit{Jumlah Layanan Tepat Waktu}}$$

3. Keaktifan Siskamling yang bertujuan Untuk mengukur tingkat keamanan masyarakat dengan formula:

$$\frac{\textit{Prosentase jumlah Kelompok Siskamling Aktif X 100}}{\textit{Jumlah keseluruhan pos siskamling}}$$

4. Tingkat Capaian Pembangunan Untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan yang menjadi kewenangan Kecamatan dengan formula;

$$\frac{\textit{Prosentase volume infrastruktur yang dibangun X 100}}{\textit{Jumlah keseluruhan target pembangunan}}$$

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Rencana Kerja (Renja Awal) Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan Visi “KUKAR IDAMAN”. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra OPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan - kebijakan perencanaan pembangunan di tahun - tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2025, Kecamatan Muara Muntai telah melaksanakan kegiatan yang

menunjang tugas, pokok dan fungsinya dan telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu: Menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum OPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, pelaksanaan kinerja Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan Perangkat Daerah dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), sebagaimana dijabarkan dalam table berikut ini:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Muara Muntai

Lembar: 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja-PD tahun (2025)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01	KECAMATAN									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	76 Nilai	75 Nilai	75 Nilai		76 Nilai	76 Nilai	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75 Dokumen	25 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	25 Dokumen	25 Dokumen	0,33
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	25 Dokumen	20 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	1,00	20 Dokumen	20 Dokumen	0,80
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	25 Dokumen	20 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	20 Dokumen	20 Dokumen	0,80

7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen	50 Dokumen	15 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	15 Dokumen	15 Dokumen	0,30
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	25 Rapat	15 Rapat	0 Rapat	0 Rapat	#DIV/0!	15 Rapat	15 Rapat	0,60
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	5 Dokumen	5 Dokumen	0,50
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	75 Lapoaran	75 Lapoaran	75 Lapoaran	75 Lapoaran		75 Lapoaran	75 Lapoaran	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	57 Orang	54 Orang	44 Orang	44 Orang	1,00	54 Orang	54 Orang	0,95
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	10 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	1 Laporan	1 Laporan	1,00
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali	#DIV/0!	0 Kali	0 Kali	0,00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	8 Dokumen	4 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	1,00	4 Dokumen	4 Dokumen	0,50
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,00	0 Laporan	0 Laporan	0,00

7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	10 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	20 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	50 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	50 Laporan	25 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	1,00	25 Laporan	25 Laporan	0,50
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	25 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	
7.01.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00

		Daerah								
7.01.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Pengolahan Data Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Penetapan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	47 Laporan	47 Laporan	47 Laporan	47 Laporan		47 Laporan	47 Laporan	
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	15 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	47 Stel	15 Stel	0 Stel	0 Stel	#DIV/0!	15 Stel	15 Stel	0,32
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	5 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	#DIV/0!	0 Orang	0 Orang	0,00
7.01.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	5 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	#DIV/0!	0 Orang	0 Orang	0,00
7.01.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Pemindahan Tugas ASN	5 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	#DIV/0!	0 Orang	0 Orang	0,00
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	#DIV/0!	0 Orang	0 Orang	0,00
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Peraturan	0 Peraturan	0 Peraturan	0 Peraturan	#DIV/0!	0 Peraturan	0 Peraturan	0,00
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	5 Bimtek	0 Bimtek	0 Bimtek	0 Bimtek	#DIV/0!	0 Bimtek	0 Bimtek	0,00

	Perundang-Undangan	Perundang-Undangan								
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	8 Layanan	8 Layanan	8 Layanan	8 Layanan		8 Layanan	8 Layanan	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	1,00	5 Jenis	5 Jenis	1,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	1,00	6 Jenis	6 Jenis	1,00
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6 Jenis	6 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	#DIV/0!	6 Jenis	6 Jenis	1,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25 Porsi	25 Porsi	25 Porsi	25 Porsi	1,00	25 Porsi	25 Porsi	1,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	1,00	5 Jenis	5 Jenis	1,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Exemplar	5 Exemplar	0 Exemplar	0 Exemplar	#DIV/0!	5 Exemplar	5 Exemplar	1,00
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	5 Jenis	5 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	#DIV/0!	5 Jenis	5 Jenis	1,00
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Kali	15 Kali	15 Kali	15 Kali	1,00	15 Kali	15 Kali	1,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	45 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	1,00	45 Laporan	45 Laporan	1,00
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150 Dokumen	150 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	1,00	150 Dokumen	150 Dokumen	1,00
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit		15 Unit	15 Unit	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1,00	1 Unit	1 Unit	1,00

		Jabatan								
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Besar	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	50 Unit	50 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	50 Unit	50 Unit	1,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	8 Unit	2 Unit	2 Unit	1,00	8 Unit	8 Unit	1,00
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	3 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	2 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	2 Unit	2 Unit	0,50
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Matrai	1000 Matrai	1000 Matrai	1000 Matrai	1,00	1000 Matrai	1000 Matrai	1,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	336 Rekening	336 Rekening	336 Rekening	336 Rekening	1,00	336 Rekening	336 Rekening	1,00

7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	#DIV/0!	0 Jenis	0 Jenis	0,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204 Org/Bulan	204 Org/Bulan	204 Org/Bulan	204 Org/Bulan	1,00	204 Org/Bulan	204 Org/Bulan	1,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	10 Unit	2 Unit	10 Unit	10 Unit		2 Unit	2 Unit	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1,00	1 Unit	1 Unit	0,08
7.01.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	10 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1,00	1 Unit	1 Unit	0,25

7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	33 Bidang	0 Bidang	0 Bidang	0 Bidang	#DIV/0!	0 Bidang	0 Bidang	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP 2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	100 Persen 88,5 Persen	100 Persen 88,5 Persen	100 Persen 88,5 Persen	100 Persen 88,5 Persen		100 Persen 88,5 Persen	100 Persen 88,5 Persen	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan		10 Kegiatan	10 Kegiatan	

7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	25 Kali	25 Kali	25 Kali	25 Kali		25 Kali	25 Kali	
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali	#DIV/0!	0 Kali	0 Kali	0,00
7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	3 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	36 Kegiatan	36 Kegiatan	36 Kegiatan	36 Kegiatan		36 Kegiatan	36 Kegiatan	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	5 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	36 Kegiatan	29 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	1,00	29 Kegiatan	29 Kegiatan	0,81

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen		95 Persen	95 Persen	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan		20 Kegiatan	20 Kegiatan	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 Orang	150 Orang	100 Orang	100 Orang	1,00	150 Orang	150 Orang	1,50
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,00	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00

7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	5 Kegiatan	5 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Kegiatan	0 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1,00	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum******)	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	25 Persen	25 Persen		25 Persen	25 Persen	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan******)	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan******)	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat******)	Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat******)	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.04.2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah******)	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	10 SPM	10 SPM	10 SPM	10 SPM		10 SPM	10 SPM	
7.01.04.2.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia******)	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia******)	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan	Jumlah Pengembangan Kehidupan Demokrasi	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00

	Pancasila	Berdasarkan Pancasila								
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen		95 Persen	95 Persen	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	13 Desa	0 Desa	13 Desa	13 Desa		0 Desa	0 Desa	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,00	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,00
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00

7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,00	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,00
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,00	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,00
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,00
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00

7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak ada program dan kegiatan yang melebihi target, terdapat beberapa program dan kegiatan yang memenuhi target dan beberapa program dan kegiatan yang tidak memenuhi target. Adapun program dan kegiatan yang tidak memenuhi target disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

1. Perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Adanya Difisit Anggaran Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Adanya Kegiatan yang salah penganggaran.

Hal-hal yang diambil dalam mengatasi hal-hal tersebut adalah:

1. Melakukan pergeseran anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan;
2. Mengurangi dan menghapus beberapa kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.
3. Melakukan penyesuaian atas salah penganggaran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan SKPD sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada. Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagaian wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan

Muara Muntai, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Muara Muntai dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat - surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Muara Muntai selama kurun waktu tahun 2021 - 2022 cukup memuaskan. Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Muara Muntai, yaitu :

a. Cakupan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan;
b. Rata-rata Kinerja Kecamatan;
c. Cakupan lembaga Masyarakat Yang Aktif;
d. Presentase jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik;
e. Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik;
f. Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Muara Muntai, sebagai berikut:

T-C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MUARA MUNTAI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Prosentase capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat			75	80	85	95	75	0	85	90	
2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100	100	100	100	100	0	100	100	
3	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	0	100	100	

4	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100	100	100	100	100	0	100	100	
5	Persentase Peningkatan kinerja dan tata kelola kecamatan			100	100	100	100	100	0	100	100	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dalam pasal 126 menerangkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagaian wewenang Bupati /Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan juga merupakan Perangkat Daerah Kabupaten / Kotayang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati /Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sedang fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan kegiatan kecamatan.
2. Pelaksanaan koordinasi atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan
3. Pelaksanaan koordinasi atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.
4. Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
5. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.`
6. Pelaksanaan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
7. Pelaksanaan pelayanan umum kepada masyarakat.
8. Pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas layanan umum di wilayah kecamatan.
9. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.

Pelaksanaan penatausahaan/urusan kesekretariatan kecamatan identifikasi permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Muara Muntai dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya:

1. Permasalahan Internal:
    a. Kualifikasi staf yang masih belum sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi
    b. Belum dapat dilaksanakannya beberapa point pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat Karena belum adanya petunjuk tekhnis serta belum disiapkannya tenaga teknis yang sudah terlatih.
2. Permasalahan Eksternal:
    a. Kesadaran masyarakat masih rendah untuk menyiapkan dan memiliki kelengkapan administrasi kependudukan serta dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh setiap warga yang merupakan produk layanan pemerintah kecamatan.
    b. Jarak antara desa-desa dan ibukota Kecamatan yang relative jauh serta jalur transportasi yang masih sulit dan mahal menyebabkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa masih belum maksimal dilaksanakan.
    c. Belum maksimalnya keterlibatan pihak ketiga (perusahaan) dalam membantu kegiatan pemberdayaan dan pembangunan wilayah desayang menjadi lokasi kegiatan usaha perusahaan tersebut

Hal-hal yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada para staf kecamatan tentang tugas dan fungsi kecamatan serta keahlian yang harus dipelajari dan dimiliki oleh setiap staf
2. Melaksanakan jenis kewenangan yang sudah dapat dilaksanakan dan mengkoordinasikan dengan pihak- pihak terkait jenis kewenangan yang belum bisa dilaksanakan
3. Melaksanakan jenis kewenangan yang sudah dapat dilaksanakan dan mengkoordinasikan dengan pihak- pihak terkait jenis kewenangan yang belum bisa dilaksanakan
4. Melakukan sosialisasi kepada aparatur desa dan warga desa tentang pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan serta dokumen-dokumen lainnya yang memang harus dimiliki oleh warga masyarakat

5. Memaksimalkan rapat koordinasi pertriwulan dalam rangka melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan pemberdayaan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa
6. Melibatkan pihak perusahan dalam kegiatan Musrenbang desa dan Musrenbang Kecamatan dalam rangka singkronisasi rencana kegiatan pemerintahan desa yang bisa dibantu dilaksanakan oleh pihak perusahaan
7. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang status lahan KBK dan mengusulkan kepada pihak terkait untuk mengeluarkan sebagian lahan yang menjadi lokasi kegiatan usaha masyarakat yang termasuk dalam lahan KBK agar bisa dimiliki dan diusahakan oleh masyarakat
8. Potensi Perkebunan Kelapa Sawit yaitu terdapatnya perkebunan kelapa sawit PT.JMS yang berlokasi di desa Muara Leka dan Desa Perian, Potensi Perikanan yaitu terdapatnya Danau Jantur dan Danau Melintang yang sebagian wilayahnya adalah wilayah Kecamatan Muara Muntai.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Review terhadap Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025
2. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan, Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai Lampiran Tabel berikut ini

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Muara Muntai Lembar : dari :

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN				8.865.022.934	KECAMATAN				15.580.073.699	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	8.004.502.934	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	8.309.692.960	

	KABUPATEN/KOTA					KABUPATEN/KOTA					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	75.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai		3 Laporan	120.000.000	

7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.000.000	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Muara Muntai	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	20 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Muara Muntai	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	25 Dokumen	10.000.000	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Muara Munt	Jumlah Dokumen Perubahan	20 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Muara Munt	Jumlah Dokumen Perubahan	25 Dokumen	7.500.000	Ada kenaikan harga belanja dan target

	Perubahan RKA-SKPD	ai	DPA-SKPD			Perubahan RKA-SKPD	ai	DPA-SKPD			kegiatan
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Muara Muntai	Jumlah dokumen	5 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Muara Muntai	Jumlah dokumen	8 Dokumen	10.000.000	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Muara Muntai	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	5 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Muara Muntai	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	8 Dokumen	7.500.000	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muara Muntai	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muara Muntai	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	75.000.000	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	75 Lapoaran	5.723.906.956	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	75 Lapoaran	5.745.906.956	

7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Muara Muntai	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	40 OB	5.635.731.014	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Muara Muntai	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	468 OB	5.635.731.014	Gaji dan Tunjangan ASN (Pagu Anggaran berdasarkan Nilai pagu RENSTRA 2023)
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Muara Muntai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Muara Muntai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000	Tahun 2023 kegiatan ini dalam realisasi anggaran mengalami kekurangan anggaran. Sehingga 2025 perlu dilakukan penambahan anggaran.
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Muara Muntai	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	4 Laporan	73.175.942	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Muara Muntai	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	4 Laporan	85.175.942	Tahun 2023 kegiatan ini dalam realisasi anggaran mengalami kekurangan anggaran. Sehingga 2025 perlu dilakukan

											penambahan anggaran.
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	50 Dokumen	28.256.100	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	50 Dokumen	30.256.100	

7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Muntai	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	25 Laporan	28.256.100	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Muntai	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	25 Laporan	30.256.100	Tahun 2023 kegiatan ini dalam realisasi anggaran mengalami kekurangan anggaran. Sehingga 2025 perlu dilakukan penambahan anggaran.
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat	Muara	Jumlah Administrasi	8 Layanan	343.309.974	Administrasi Umum Perangkat	Muara	Jumlah Administrasi	8 Layanan	765.000.000	

	Daerah	Muntai	Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia			Daerah	Muntai	Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	15.000.000	Penambahan Anggaran disebabkan adanya rencana rehabilitasi instalasi jaringan listrik Gedung Kantor Camat, BPU dan Rumah Dinas Jabatan Camat
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	35.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	55.000.000	Tahun 2023 kegiatan ini dalam realisasi anggaran mengalami kekurangan anggaran. Sehingga 2025 perlu dilakukan

											penambahan anggaran.

7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6 Jenis	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6 Jenis	50.000.000	Sebelumnya belum ada anggaran atas sub kegiatan
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25 Porsi	20.809.974	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25 Porsi	100.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Jenis	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Jenis	10.000.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Muara Muntai	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Kali	20.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Muara Muntai	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Kali	85.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muara Muntai	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	45 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muara Muntai	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	45 Laporan	350.000.000	

			SKPD					Konsultasi SKPD			
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Muara Muntai	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150 Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Muara Muntai	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150 Dokumen	100.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Muara Muntai	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	15 Unit	640.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Muara Muntai	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	15 Unit	580.000.000	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	180.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	-	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	180.000.000	Sewa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat)

7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Muara Muntai	JumlahPengadaan Mebel	8 Unit	60.000.000	Pengadaan Mebel	Muara Muntai	JumlahPengadaan Mebel	0 Unit	-	Anggaran dialihkan ke sub kegiatan lain
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	200.000.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	200.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	200.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Muara Muntai	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	634.029.904	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Muara Muntai	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	638.529.904	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Matrai	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Matrai	7.500.000	

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	336 Rekening	296.177.712	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	336 Rekening	296.177.712	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204 Org/Bulan	334.852.192	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204 Org/Bulan	334.852.192	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Muara Muntai	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	2 Unit	560.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Muara Muntai	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	2 Unit	430.000.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	9 Unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	9 Unit	55.000.000	

			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	60.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	200.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Muntai	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Muntai	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	50.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Muara Muntai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Pemeliharaan/	1 Unit	500.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Pemeliharaan/Rehabilitasi	Muara Muntai	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	1 Unit	125.000.000	

			Rehabilitasi					Lainnya			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Muara Muntai	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP 2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	100 Persen 88,5 Persen	500.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Muara Muntai	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP 2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	100 Persen 88,5 Persen	12.650.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Muara Muntai	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	36 Kegiatan	500.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Muara Muntai	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	36 Kegiatan	12.650.000.000	

7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Muara Muntai	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	6 Laporan	-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Muara Muntai	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	6 Laporan	1.550.000.000	Mengakomodir Pelaksanaan : 1. HKG 2. Fasilitasi HUT RI 3. Fasilitasi Hari - Hari besar keagamaan 4. Keperamukaan 5. Erau 6. MTQ 7. Keolahrahaan (Bupati CUP)
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Muntai	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	51 Laporan	500.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Muntai	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	51 Laporan	11.100.000.000	Mengakomodir Musrenbang yang di usulkan melalui SIPD.

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Muara Muntai	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	95 Persen	75.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Muara Muntai	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	95 Persen	830.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Muara Muntai	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	20 Kegiatan	75.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Muara Muntai	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	20 Kegiatan	830.000.000	

7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Muara Muntai	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 Orang	50.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Muara Muntai	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 Orang	55.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Muara Muntai	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan	8 Laporan	25.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Muara Muntai	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan	8 Laporan	775.000.000	

	Wilayah Kecamatan		Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Muara Muntai	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Muara Muntai	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	50.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Muara Muntai	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	100 Persen	-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Muara Muntai	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	100 Persen	50.000.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Muara Muntai	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Laporan	-	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Muara Muntai	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Laporan	50.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Muara Muntai	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	95 Persen	285.520.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Muara Muntai	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam	95 Persen	570.520.000	

								Kategori Baik			

7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Muara Muntai	Jumlah Desa Yang difasilitasi	13 Desa	285.520.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Muara Muntai	Jumlah Desa Yang difasilitasi	13 Desa	570.520.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Muara Muntai	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Kegiatan	55.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Muara Muntai	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Kegiatan	306.000.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Muara Muntai	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Kegiatan	200.520.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Muara Muntai	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Kegiatan	214.520.000	Penambahan anggaran guna mengakomodir honorarium PPTK
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan	Muara Munt	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan	2 Kegiatan	30.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi,	Muara Munt	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan	2 Kegiatan	50.000.000	

	Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	ai	Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	ai	Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022–2026.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Muara Muntai dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Berikut ini usulan program dan kegiatan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Prioritas I, Prioritas II serta Rencana Pembangunan yang pembiayaan di lakukan melalui CSR yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2024 di Kecamatan Muara Muntai:

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Muara Muntai

NO	KAMUS USULAN	MASALAH	SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Masih terputusnya/belum rampung jembatan ulin Jalan Gerbang Dayaku yang terletak di RT. 009	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Jl. Gerbang Dayaku RT. 009, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Muntai Ulu	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1420707 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK

							Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
2	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Tingkat kebisingan jalan yang masih tinggi dalam penggunaan papan kayu Ulin dan seringnya terjadi kerusakan lantai jembatan	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Jl. Gerbang Dayaku RT. 002, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Muntai Ulu	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1425843 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
3	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Gang Pepaya masih menggunakan papan Kayu Ulin yang rentan rusak	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Gang Pepaya Jl. Jend. A. Yani RT. 010, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Muntai Ulu	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1425974 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
4	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Jl. KH. Ahmad Dahlan RT. 006 - RT. 007 masih kurang lebar dan masih menggunakan papan Kayu Ulin yang rentan rusak padahal termasuk akses ke kawasan sekolahan dan perkantoran	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Jl. KH. Ahmad Dahlan RT. 006 - RT. 007, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Muntai Ulu	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1425996 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke

							pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
5	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Gang Kedondong sebagian belum disemenisasi , yang masih menggunakan papan Kayu Ulin yang rentan rusak	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Gang Kedondong Jl. Jend. A. Yani RT. 010, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Muntai Ulu	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1426012 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
6	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Jembatan yang berada di Jl. Dr. Fl Tobing belum seluruhnya dilakukan peningkatan berupa semenisasi sehingga jembatan yang merupakan transportasi utama bagi pedagang untuk mengangkut barang dagangan serta merupakan transportasi utama untuk menuju ke Sekolah SMA, SMP, SDN 002, TK Gajah Mada dan Puskesmas Muara Muntai. Dengan kondisi tersebut, jembatan tersebut lebih memungkinkan cepat mengalami kerusakan seperti	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Jl. dr. FL. Tobing RT 002, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Muntai Ilir	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1423897 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)

		papan yang patah, licin saat hujan, suara yang berisik karena paku banyak lepas.					
7	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Jembatan di RT 002 memeilik ketinggian yang lebih rendah dibandingkan RT 001 dan RT 003 yang mengapitnya sehingga padaa saat banjur, jembatan bRT 002 akan lebih cepat tenggelam karena ketinggian jembatan < 1 meter, kondisi jembatan yang berisik karena paku longgar masyarakat terganggu suaranya, saat banjir, akses transportasi masyarakat RT 002 menjadi lebih sulit terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena pedagang keliling tidak akan lewat di RT 002.	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan RT 002 Muara Muntai Ilir, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Muntai Ilir	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1423953 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
8	Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) di Kecamatan Muara Muntai	Desa Muara Muntai Ilir belum memiliki Tempat Pendidikan Alquran (TPA) untuk aktifitas mengajar Alquran sehingga anak-anak yang ingin mengaji harus	Pembangunan Taman Pendidikan Al Quran (TPA) JL. dr. FL. Tobing RT 002, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Muntai Ilir	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1424587 (Usulan sudah sesuai dengan

		pergi ke Desa lain. Kendala ini membuat para orang tua memiliki kekawatiran pada anak-anak karena harus bersepeda sejauh >1 KM untuk menuju TPA di desa lain.					pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
9	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Muntai	jalan jembatan di desa muara muntai ilir khususnya jl. gajah mada RT 002 menuju ke jalan jl. dr. FL tobing belum ada, sehingga rumah yang terdapat di lokasi tersebut sulit untuk beraktifitas terutamaa saat musim hujan atau banjir. dengan adanya pembangunan jalan di tempat tersebut dapat meningkatkan nilai jual tanah sekitar.	Pembangunan Jalan Lingkungan RT 002, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Muntai Ilir	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1429998 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
10	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Belum ada penguhubung jalur 2 antara rt.05 dan rt.06	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman Jalan : pangeran hidayatullah rt.05 desa pulau harapan, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Pulau Harapan	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1434003 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)

11	Penyediaan perlengkapan Jalan (LPJU)	Jalur 2 belum tersedia lampu listrik	Penyediaan perlengkapan Jalan (LPJU) Jalan: Pangeran Hidayatullah rt.01 desa pulau harapan, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Pulau Harapan	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1434193 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
12	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Belum ada jembatan menuju tempat tempat pembuangan akhir	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman Jalan : Pangeran Hidayatullah rt.06 desa palau harapan , Kab. Kutai Kartanegara	Desa Pulau Harapan	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1434225 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
13	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Kembang Janggut	Semenisasi Jalan Desa Batuq Ke Desa Rabak RInding. 5 , 7 Km Mengigat Jalan Tersebut sangat di butuh bagi warga untuk menjaul hasil kebun.sementara jalan jalan tersebut sudah sangat tidak memedai . di karenakan jalan tersebut banyak lubang	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Batuq Rt 01, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Batuq	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1429723 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-

							BUP/HK/2021)
14	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja	lanjutan pembangunan jalan ulin tambak dua 5 Km	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Batuq Rt 03, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Batuq	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1429965 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
15	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Pembangunan Lapangan Putsal Dan Lapangan Voli Permanen 25 x 50 M	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu Desa Batuq Rt 03, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Batuq	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1432810 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
16	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Tabang	Pembangunan Jalan jembatan gang Ke tambak Dua 2 x 200 M	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Batuq rt 03 , Kab. Kutai Kartanegara	Desa Batuq	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1432857 (Usulan sudah sesuai dengan

							pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
17	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Kota Bangun	Lanjutan Pembuatan Jalan Tembok desa Batuq Ke Kampung Loa Deras .5 Km	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Batuq Rt 05, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Batuq	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1432940 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
18	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Anggana	semenisasi jalan jembatan ulin di pemukiman Rt 04 Rt 05 . 4 x 400 M	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Batuq rt 04 rt 05, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Batuq	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1432967 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
19	Penyediaan perlengkapan Jalan (LPJU)	Belum Adanya Lampu Penerangan di 3 Jalan Desa Kayu Batu (Jl. Dewi Sartika, Jl. dr. Nazir, dan Jl. Bahrudin)	Penyediaan perlengkapan Jalan (LPJU) Jl. dr. Nazir RT. 03 Desa Kayu Batu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Kayu Batu	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1430692

							(Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
20	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan Muara Muntai	Belum Ada Jaringan Pipa Air PDAM Dari Desa Lebak Mantan Kec. Muara Wis Ke Paundana RT. 07 Desa Kayu Batu	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan Muara Muntai Puandana RT.07 Desa Kayu Batu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Kayu Batu	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1431915 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
21	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	beberapa bagian jalan rusak dan terendam saat banjir. kondisi jembatan di jalan bahrudin rusak berat tidak bisa dilewati kendaraan dengan beban berat	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Jl. Bahrudin Desa Kayu Batu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Kayu Batu	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1432168 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)

22	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Pelebaran dan Semenisasi Jalan Dewi Sartika mengingat kondisi jalan sempit dan sering mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan polusi suara, karena ketika di lintasi kendaraan bermotor jembatan mengeluarkan bunyi yang berisik sehingga mengganggu aktivitas warga.	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Jl. Dewi Sartika Desa Kayu Batu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Kayu Batu	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1432483 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
23	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Peningkatan, Pelebaran dan Semenisasi Jalan Dr. Nazir mengingat kondisi jalan sempit dan sering mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan polusi suara, karena ketika di lintasi kendaraan bermotor jembatan mengeluarkan bunyi yang berisik sehingga mengganggu akrivitas warga.	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Jl. dr. Nazir Desa Kayu Batu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Kayu Batu	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1432765 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
24	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Muntai	Pembangunan Pagar Kuburan Desa Kayu Batu, Pagar Sebelumnya Sudah Banyak Yang Rusak dan Lapuk.	Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. dr. Nazir RT.02, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Kayu Batu	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1433294 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor

							: 247/SK-BUP/HK/2021)
25	Rehabilitasi Jalan Menuju Akses Pendidikan,Kesehatan, Wisata dan Jalan Produksi Kabupaten	Pembangunan Akses Jalan Pendidikan Di SDN 012 Desa Kayu Batu Belum Ada Peningkatan dan Kondisi Jalan Sempit.	Rehabilitasi Jalan Menuju Akses Pendidikan,Kesehatan, Wisata dan Jalan Produksi Jl. dr. Nazir 04 Desa Kayu Batu, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Kayu Batu	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1433821 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
26	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Merupakan sarana penghubung / Jalan antar gang-gang jalur 4 RT 08 Di Desa Muara Leka (Dusun Leka) sepanjang 400 meter dgn lebar 4 meter	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Desa Muara Leka (Dusun Leka 1) RT 08 Jalur 4 Kecamatan Muara Muntai, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Leka	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1433329 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
27	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	lanjutan semenisasi jalan RT 07 , sebagai akses jalan warga dusun Leka 1 dan memperlancar kegiatan perekonomian warga	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Desa Muara Leka (Dusun Leka 1) RT 07 Jalur 1, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Leka	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1435543 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat

							melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
28	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Sebagai Akses Transportasi untuk mengangkut hasil bumi sebagai penunjang perekonomian warga	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Desa Muara Leka RT 03 , Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Leka	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1435720 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
29	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	adanya lanjutan semenisasi jalur 3 RT 06 Di Desa Muara Leka (Dusun Leka 2) sepanjang 200m x 4 m yang merupakan akses jalan warga untuk membawa hasil tani yang menunjang perekonomian warga	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Desa MUara Leka (Dusun Leka 2) Jalur 3, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Leka	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1436040 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
30	Pemeliharaan Penerangan Bangunan di Kecamatan Muara Muntai	rawan kecelakaan akibat jalan gelap saat malam hari terhadap warga melewati lintas dusun sehingga mengharapakn adanya penerangan lampu jalan	Penyediaan perlengkapan Jalan (LPJU) Desa Muara leka (Dusun Leka 1), Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Leka	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1436228 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan

							Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
31	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	merupakan jalan lintas penghubung antara Rt 02 dan RT 03 membawa hasil panen atau hasil bumi	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Desa Muara Leka (Rt 02 dan Rt 03), Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Leka	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1436432 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
32	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Muntai	Karna Kurangnya Tugu Penahan Napung/Gulma Yang Berada Di Danau/Sungai Di Desa Muara Aloh	Pembangunan Turap Danau/Sungai Desa Muara Aloh, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Aloh	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1428321 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
33	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan Muara Muntai	Masih Kurangnya Bak Penampung Air Bersih, Air Bersih Yang Di Salurkan Ke Warga Desa Muara Aloh	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Desa Muara Aloh, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Aloh	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1428389 (Usulan sudah sesuai dengan

							pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
34	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Muntai	Karena Tidak Adanya Jembatan Penyebrangan Sangat Menyusahkan Warga Beraktifitas	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Muara Aloh Rt 02 Menuju Rt 06, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Muara Aloh	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1430938 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
35	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Tidak adanya gedung posyandu Bunga Rampai 2 di RT.8 dan 9	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu Jalan Kampung Lama RT.008, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Jantur	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1429293 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
36	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Muntai	Tidak adanya Turap Menahan Gulma yang sangat diperlukan ketika ada bencana datang	Pembangunan Turap Jalan Kampung Lama RT.08 dan 09, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Jantur	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1429713

							(Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
37	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Tidak Selesainya Pembangunan Jalan Jemabatan tersebut sehingga tidak bisa di lewati oleh warga setempat	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman Jalan Kampung Lama RT.10.11 dan 12, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Jantur	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1430433 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
38	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Muntai	TIDAK TERHUBUNGNYA JALAN JEMABATAN ANTAR RT.005 SAMPAI RT.007 DI DESA JANTUR SELATAN MEMBUAT KURANGNYA AKSES JALAN ANTAR RT DI DESA JANTUR SELATAN, KECAMATAN MUARA MUNTAI, KABUPATE KUTAI KARTANEGARA.	Pembangunan Jalan Lingkungan JL.RAYA SUNGAI JANTUR RT.005 DESA JANTUR SELATAN KECAMATAN MUARA MUNTAI KABUPATEN KUTAI KARTANEGA., Kab. Kutai Kartanegara	Desa Jantur Selatan	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1430013 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)

39	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Muntai	TIDAK TERHUBUNGNYA JALAN JEMABATAN ANTAR RT.006 SAMPAI RT.007 DI DESA JANTUR SELATAN MEMBUAT KURANGNYA AKSES JALAN ANTAR RT DI DESA JANTUR SELATAN, KECAMATAN MUARA MUNTAI, KABUPATE KUTAI KARTANEGARA.	Pembangunan Jalan Lingkungan JL.RAYA SUNGAI JANTUR RT.006 DESA JANTUR SELATAN KECAMATAN MUARA MUNTAI KABUPATEN KUTAI KARTANEGAR, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Jantur Selatan	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1430249 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
40	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Muntai	TIDAK ADA AKSES JALAN MENUJU RUMAH WARGA DI RT.012 DI DESA JANTUR SELATAN KECAMATAN MUARA MUNTAI, KABUPATE KUTAI KARTANEGARA.	Pembangunan Jalan Lingkungan JL.RAYA SUNGAI JANTUR RT.012 DESA JANTUR SELATAN KECAMATAN MUARA MUNTAI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA., Kab. Kutai Kartanegara	Desa Jantur Selatan	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 1430348 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
41	Pembuatan Tempat Sampah Penampungan Sementara di Kecamatan Muara Muntai	di rebaq rinding setiap warga masih melakukan buang sampah di sembarang tempat bahkan ban yak yang membuang sampah ke sungai di karenakan tidak ada tempat pembuangan sampah di desa ini, sehingga penting adanya tempat pembuangan sampah agar	Pembuatan Tempat Sampah Penampungan Sementara Jl. kh agus salim rt.05 Desa rebaq Rinding, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Rebaq Rinding	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-

		warga bisa melakukan kebersihan lingkungan secara teratur					BUP/HK/2021)
42	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Muntai	Perlunya pembangunan jalan alternatif di desa Rebaq Rinding yang selama ini hanya berporos 1 jalur	Pembangunan Jalan Lingkungan Jl KH AGus Salim RT 1, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Rebaq Rinding	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
43	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Pelebaran Jalan dari 4 ke 6 Meter sangat diperlukan di iringi padatnya kendaraan lalu lalang pada jalan desa	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan JL KH AGUS SALIM RT 3, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Rebaq Rinding	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
44	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Perlunya semenisasi jalan untuk mencegah kerusakan pada papan jalan ulin	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Jl KH AGUS SALIM RT 3, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Rebaq Rinding	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan

							sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
45	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Muntai	Perlunya Pembangunan Jalan Beton Poros di tembokan Desa	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Rebaq Rinding RT 1, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Rebaq Rinding	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
46	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Perlunya Peninggian Jalan dikarenakan adanya Banir yang mengenai jalan poros di jalan tersebut	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan RT 2, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Rebaq Rinding	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
47	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara	Perlunya Peninggian Jalan dikarenakan adanya Banir yang mengenai jalan poros di	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan RT 1, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Rebaq Rinding	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID

	Muntai	jalan tersebut					Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
48	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Perlunya Pelebaran Jalan menjadi 6 M Jalan dikarenakan intensitas jalan sering dilalui kendaraan roda empat	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan RT 2, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Rebaq Rinding	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
49	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Perlunya Pelebaran Jalan menjadi 6 M Jalan dikarenakan intensitas jalan sering dilalui kendaraan roda empat	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan RT 1, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Rebaq Rinding	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
50	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Muara	PERLUNYA GEDUNG SEKRETARIAT PENYULUH KB DI	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi RT 4	Desa Rebaq Rinding	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan

	Muntai	KECAMATAN MUARA MUNTAI	REBAQ RINDING, Kab. Kutai Kartanegara				Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
51	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Perlunya Semenisasi Jalan Desa yang dimana mudah rusak disebabkan intensitas kendaraan roda 4 yang selalu lewat	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan RT 4, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Rebaq Rinding	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
52	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Perlunya Semenisasi Jalan Desa yang dimana mudah rusak disebabkan intensitas kendaraan roda 4 yang selalu lewat	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan RT 5, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Rebaq Rinding	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)

53	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	JALAN POROS ANTARA DESA BATUQ DAN REBAQ RINDING SANGATLAH PENTING, DIKARENAKAN AKTIFITAS LALU LINTAS MASYRAKAT SANGAT BANYAK DAN RAMAI,. SEHINGGA SANGAT PERLU UNTUK DILAKUKAN PEMELIHARAAN	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan JL. K.H AGUS SALIM RT.03, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Rebaq Rinding	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 09-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
54	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Muntai	Pembangunan Jalan Jembatan Ulin menuju pelabuhan RT.001 Desa Tanjung Batuq Harapan	Pembangunan Jalan Lingkungan Tanjung Batuq Harapan, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Tanjung Batuq Harapan	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
55	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Muntai	Transportasi jalan sudah tidak memadai dengan keadaan mobilitas penduduk yang menggunakan roda dua dan roda empat sehingga menyebabkan kerusakan pada badan jalan	Pembangunan Jalan Lingkungan Tanjung Batuq Harapan, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Tanjung Batuq Harapan	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-

							BUP/HK/2021)
56	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Muara Muntai	untuk mengurangi dampak erosi di dataran rendah yang menyebabkan kerugian materil kepada nelayan budidaya dan nelayan tangkap didesa Tanjung Batuq Harapan	Pembangunan Turap Tanjung Batuq Harapan, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Tanjung Batuq Harapan	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
57	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Muntai	PERLUNYA SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN DI DESA	Pembangunan Jalan Lingkungan RT 1, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Tanjung Batuq Harapan	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
58	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Muntai	Perlunya Pembangunan Jalan Nusa Indah untuk membantu para petani	Pembangunan Jalan Lingkungan JL NUSA INDAH PERIAN, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Perian	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan

							Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
59	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Muntai	PERLUNYA JALAN MENUJU AKSES WISATA DESA	Pembangunan Jalan Lingkungan KM 23 DESA PERIAN, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Perian	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
60	Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) di Kecamatan Muara Muntai	PERLUNYA PEMBANGUNAN TPA DI RT 8 KARENA UNTUK MENJANGKAU RT 10, 7 DAN 5	Pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) RT 8 , Kab. Kutai Kartanegara	Desa Perian	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
61	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Muara Muntai	PERLINYA GEDUNG SEKRETARIAT ORGANISASI BUDAYA INDU ANJAT YANG TELAH LAMA TIDAK MEMILIKI GEDUNG SEKRETARIAT	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi RT 8, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Perian	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan

							pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
62	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Untuk menambah pengetahuan masyarakat si bidang pertukangan beton	Drainase jalan Lingkungan Desa perian, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Perian	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 09-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
63	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Muara Muntai	Belum Terpenuhinya Semua Terbangun Jalan Jembatan di wilayah Tersebut	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Jl. Kampung Baru RT.01 Desa Jantur Baru, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Jantur Baru	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 08-03-2024 (Usulan sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)
64	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Muara Muntai	Perlu Adanya Bantuan Dana Dalam Pembebasan Lahan Sehingga Terlaksananya Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Jantur Baru, Kab. Kutai Kartanegara	Desa Jantur Baru	Panjang Jalan	1 Paket	Usulan prioritas dan sudah masuk dalam usulan Aplikasi SIPD dengan ID Usulan 10-03-2024 (Usulan

		Penghubung Antara Desa Jantur Baru dan Desa Jantur Selatan					sudah sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat melalui SK Bupati Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021)

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran Renja-PD

Rencana Kerja 2025 merupakan bagian dari pada penyelesaian permasalahan yang dihadapai. agar tujuan dan sasaran bisa tercapai dibawah ini disajikan rumusan tabel tujuan dan sasaran beserta permasalahan yang terjadi pada Perangkat Daerah Kecamatan Muara Muntai, yaitu :

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 2025

NO	URAIAN			
	Masalah	Akar Masalah	Tujuan	Sasaran
1	Belum optimalnya tertib administrasi di Kecamatan	Kurangnya pemahaman aparatur terhadap Tugas Pokok	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan
		Minimnya fasilitas (sarana dan prasarana) trantib di kecamatan untuk pelayanan ke seluruh wilayah kecamatan yang cukup luas		
2	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan di kecamatan	Belum efektifnya pelaksanaan musrenbang di kecamatan sebab rencana pembangunan untuk tahun depan seringkali tidak disampaikan sebelumnya kepada peserta/masyarakat		
3	Belum optimalnya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan	Belum optimalnya pembinaan aparatur desa dan/atau kelurahan termasuk fasilitasi pemilihan kepala desa dan BPD.		
		Belum optimalnya penyelesaian batas wilayah dan sengketa tanah		
4	Belum optimalnya pelayanan PATEN dan pelayanan sarana dan prasarana umum wilayah kecamatan	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan PATEN		
		Masih kurangnya kemampuan SDM dalam memberikan pelayanan PATEN sesuai SOP		
5	Belum optimalnya pelayanan dan koordinasi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, keagamaaan, budaya, dan lembaga kemasyarakatan	Kondisi geografis antar wilayah dalam kecamatan yang berjauhan		
		Minimnya sarana dan prasarana sosial, umum, dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah		
		Minimnya data dan informasi dari desa dan atau kelurahan		
		Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur desa dan/atau kelurahan dalam		

		melaksanakan/memfasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial		
6	Belum optimalnya kinerja dan tata kelola kecamatan	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur kecamatan		
		Belum optimalnya pengelolaan arsip kecamatan secara baku		
		Beban kerja belum merata untuk semua jabatan terutama yang menangani keuangan		
		Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur kecamatan		

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Kantor Camat Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis (Renstra) Kantor Camat Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 – 2026. Pada dasarnya Rencana Kerja tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Kantor Camat Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025.

Target kinerja mereprensentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra), Kantor Camat Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Kantor Camat Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan – kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Kantor Camat Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai tabel berikut:

Tabel T-C.33.(koreksi sesuaikan dengan table 32
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Muara Muntai

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN				15.580.073.699				24.761.015.248
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Muara Muntai	76 Nilai	9.696.015.248	APBD Kutai Kartanegara		76 Nilai	10.096.015.248
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	5 Dokumen	120.000.000	APBD Kutai Kartanegara		5 Dokumen	75.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muara Muntai	25 Dokumen	10.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan	25 Dokumen	5.000.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Muara Muntai	20 Dokumen	10.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan	20 Dokumen	5.000.000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Muara Muntai	20 Dokumen	7.500.000	APBD Kutai Kartanegara	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan	20 Dokumen	5.000.000

7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen	Muara Muntai	15 Dokumen	10.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan	15 Dokumen	5.000.000
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Muara Muntai	15 Rapat	7.500.000	APBD Kutai Kartanegara	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan	15 Rapat	5.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muara Muntai	5 Dokumen	75.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan	5 Dokumen	50.000.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	0 Dokumen		APBD Kutai Kartanegara		0 Dokumen	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Muara Muntai	75 Lapoaran	5.745.906.956	APBD Kutai Kartanegara		75 Lapoaran	5.723.906.956
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Muara Muntai	468 OB	5.635.731.014	APBD Kutai Kartanegara	Gaji dan Tunjangan ASN (Pagu Anggaran berdasarkan Nilai pagu RENSTRA 2023)	54 Orang	5.635.731.014
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Dokumen	-
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-

7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Muara Muntai	1 Laporan	25.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Tahun 2023 kegiatan ini dalam realisasi anggaran mengalami kekurangan anggaran. Sehingga 2025 perlu dilakukan penambahan anggaran.	1 Laporan	15.000.000
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Muara Muntai	0 Kali	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kali	-
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Muara Muntai	4 Dokumen	85.175.942	APBD Kutai Kartanegara	Tahun 2023 kegiatan ini dalam realisasi anggaran mengalami kekurangan anggaran. Sehingga 2025 perlu dilakukan penambahan anggaran.	4 Dokumen	73.175.942
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Muara Muntai	50 Dokumen	30.256.100	APBD Kutai Kartanegara		50 Dokumen	28.256.100
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Dokumen	-
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-

7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-
7.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Muara Muntai	25 Laporan	30.256.100	APBD Kutai Kartanegara	Tahun 2023 kegiatan ini dalam realisasi anggaran mengalami kekurangan anggaran. Sehingga 2025 perlu dilakukan penambahan anggaran.	25 Laporan	28.256.100
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Dokumen	-
7.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Muara Muntai	11 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		11 Dokumen	-
7.01.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Dokumen	-
7.01.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Dokumen	-

7.01.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Dokumen	-
7.01.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Dokumen	-
7.01.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Pengolahan Data Retribusi Daerah	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Dokumen	-
7.01.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Dokumen	-
7.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Dokumen	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Muara Muntai	47 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		47 Laporan	30.000.000
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Muara Muntai	15 Stel	-	APBD Kutai Kartanegara		15 Stel	30.000.000
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-

7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-
7.01.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Muara Muntai	0 Orang	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Orang	-
7.01.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Muara Muntai	0 Orang	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Orang	-
7.01.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Pemindahan Tugas ASN	Muara Muntai	0 Orang	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Orang	-
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Muara Muntai	0 Orang	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Orang	-
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Muara Muntai	0 Peraturan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Peraturan	-
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Muara Muntai	0 Bimtek	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Bimtek	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Muara Muntai	8 Layanan	765.000.000	APBD Kutai Kartanegara		8 Layanan	343.309.974
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Muara Muntai	5 Jenis	15.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Penambahan Anggaran disebabkan adanya rencana rehabilitasi instalasi jaringan listrik Gedung Kantor Camat, BPU dan Rumah	5 Jenis	7.500.000

							Dinas Jabatan Camat		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muara Muntai	6 Jenis	55.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Tahun 2023 kegiatan ini dalam realisasi anggaran mengalami kekurangan anggaran. Sehingga 2025 perlu dilakukan penambahan anggaran.	6 Jenis	35.000.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Muara Muntai	6 Jenis	50.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Sebelumnya belum ada anggaran atas sub kegiatan	6 Jenis	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Muara Muntai	25 Porsi	100.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	25 Porsi	20.809.974
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Muara Muntai	5 Jenis	10.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	5 Jenis	10.000.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Muara Muntai	5 Exemplar	-	APBD Kutai Kartanegara		5 Exemplar	-
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	Muara Muntai	5 Jenis	-	APBD Kutai Kartanegara		5 Jenis	-
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Muara Muntai	15 Kali	85.000.000	APBD Kutai Kartanegar	0	15 Kali	20.000.000

						a			
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muara Muntai	45 Laporan	350.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	45 Laporan	200.000.000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Muara Muntai	150 Dokumen	100.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	150 Dokumen	50.000.000
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Muara Muntai	15 Unit	580.000.000	APBD Kutai Kartanegara		15 Unit	640.000.000
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muara Muntai	1 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		1 Unit	180.000.000
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Muara Muntai	0 Unit	180.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Sewa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat)	0 Unit	-
7.01.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Besar	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Muara Muntai	50 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		50 Unit	60.000.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Muntai	8 Unit	200.000.000	APBD Kutai Kartanegar	0	8 Unit	200.000.000

						a			
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Muntai	2 Unit	200.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	2 Unit	200.000.000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Muara Muntai	12 Bulan	638.529.904	APBD Kutai Kartanegara		12 Bulan	634.029.904
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muara Muntai	1000 Matrai	7.500.000	APBD Kutai Kartanegara	0	1000 Matrai	3.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Muara Muntai	336 Rekening	296.177.712	APBD Kutai Kartanegara	0	336 Rekening	296.177.712
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muara Muntai	0 Jenis	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Jenis	-
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Muara Muntai	204 Org/Bulan	334.852.192	APBD Kutai Kartanegar	0	204 Org/Bulan	334.852.192

						a			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Muara Muntai	2 Unit	430.000.000	APBD Kutai Kartanegara		2 Unit	560.000.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muara Muntai	0 Unit	55.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	0 Unit	-
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Muara Muntai	1 Unit	200.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	1 Unit	60.000.000
7.01.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Muntai	0 Unit	50.000.000	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegar		0 Unit	-

						a			
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Muara Muntai	1 Unit	125.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	1 Unit	500.000.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Muara Muntai	0 Bidang	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Bidang	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP 2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	Muara Muntai	100 Persen 88,5 Persen	12.650.000.000	APBD Kutai Kartanegara		100 Persen 88,5 Persen	12.650.000.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Muara Muntai	5 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		5 Kegiatan	-
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-

7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Muara Muntai	10 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		10 Kegiatan	-
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Dokumen	-
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Muara Muntai	25 Kali	-	APBD Kutai Kartanegara		25 Kali	-
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Muara Muntai	0 Kali	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kali	-
7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Muara Muntai	36 Kegiatan	12.650.000.000	APBD Kutai Kartanegara		36 Kegiatan	12.650.000.000
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-

7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Muara Muntai	0 Kegiatan	1.550.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Mengakomodir Pelaksanaan : 1. HKG 2. Fasilitasi HUT RI 3. Fasilitasi Hari - Hari besar keagamaan 4. Keperamukaan 5. Erau 6. MTQ 7. Keolahrahaan (Bupati CUP)	0 Kegiatan	1.550.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Muntai	29 Kegiatan	11.100.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Mengakomodir Musrenbang yang di usulkan melalui SIPD.	29 Kegiatan	11.100.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Muara Muntai	95 Persen	830.000.000	APBD Kutai Kartanegara		95 Persen	1.100.000.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Muara Muntai	20 Kegiatan	830.000.000	APBD Kutai Kartanegara		20 Kegiatan	1.100.000.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Muara Muntai	150 Orang	55.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	150 Orang	100.000.000
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Muntai	2 Kegiatan	775.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	2 Kegiatan	1.000.000.000

7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Muara Muntai	100 Persen	-	APBD Kutai Kartanegara		100 Persen	-
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Muara Muntai	5 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		5 Kegiatan	-
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Muara Muntai	5 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		5 Kegiatan	-
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum******)	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Muara Muntai	25 Persen	-	APBD Kutai Kartanegara		25 Persen	-

7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan******)	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan******)	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat******)	Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat******)	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.04.2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah******)	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Muara Muntai	10 SPM	-	APBD Kutai Kartanegara		10 SPM	-
7.01.04.2.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia******)	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia******)	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Muara Muntai	100 Persen	-	APBD Kutai Kartanegara		100 Persen	-
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Muara Muntai	100 Persen	50.000.000	APBD Kutai Kartanegara		100 Persen	-
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-

		Indonesia							
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-

7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Muara Muntai	0 Kegiatan	50.000.000	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Muara Muntai	95 Persen	635.520.000	APBD Kutai Kartanegara		95 Persen	915.000.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Muara Muntai	0 Desa	635.520.000	APBD Kutai Kartanegara		0 Desa	915.000.000
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Muara Muntai	2 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		2 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Muara Muntai	0 Kegiatan	65.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Muara Muntai	1 Kegiatan	306.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	1 Kegiatan	55.000.000
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-

7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Muara Muntai	2 Kegiatan	214.520.000	APBD Kutai Kartanegara	Penambahan anggaran guna mengakomodir honorarium PPTK	2 Kegiatan	200.520.000
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Muara Muntai	2 Kegiatan	50.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	2 Kegiatan	30.000.000
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Muara Muntai	2 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		2 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-

7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Muara Muntai	0 Kegiatan		APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana strategis Kecamatan Muara Muntai Tahun 2022-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun.

Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Muara Muntai.

Rencana Kerja Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2025. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Muara Muntai.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Kecamatan Muara Muntai ini juga masih terdapat kekurang - kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ccc.RENJA KECAMATAN KENOHAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya berupa dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kenohan dipakai sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Renja Kecamatan Kenohan yang selanjutnya akan dipakai sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Kenohan. Muatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome.*

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Kenohan disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu, b) Rumusan status kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini, c) Rumusan peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan Renja, d) Rumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan, e) pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana, f) rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja, g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan, h) prakiraan maju pendanaan untuk tahun

berikutnya, i) kejelasan siapa yang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran. Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan kerangka berfikir yang komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan melalui a) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, b) kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur Pemerintah dan non pemerintah, c) keterwakilan yang mewadai dari seluruh segmen masyarakat terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal, d) berperan aktif pada pelaksanaan musrenbang RKPD dari segi penerapan perencanaan partisipatif, e) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan serta prioritas program.

Pendekatan politis, penyusunan Renja Kecamatan Kenohan mengacu pada RKPD dan RPJMD yang merupakan bentuk konsekuensi politis antara Bupati/Wakil Bupati terpilih. Pendekatan ini juga tercermin pada keterlibatan aktif DPRD dalam musrenbang Kecamatan dan kabupaten termasuk hasil sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD, kemudian dokumen RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan sampai RAPBD.

Pendekatan top down, perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui rapat koordinasi dan musrenbang mulai tingkat nasional, provinsi dan kabupaten juga tujuan *globalMDGs.* Pendekatan ini tercermin pada

a. sinergi dengan program prioritas nasionaldan daerah;
b. konsisten pada RPJMD, RKPD dan Renstra Kecamatan Kenohan, Konsisten dengan dokumen RTRW daerah,
c. penanganan masalah dengan pendekatan holistic dan pendekatan sistem.Pendekatan *bottom-up,* perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dan diselaraskan melalui musrenbang, konsisten terhadap visi misi RPJMD serta kesepakatan masyarakat tentang prioritas pembangunan dan

hasil forum SKPD.

Penyusunan Renja ini disesuaikan dengan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja ini memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kecamatan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9 Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10 Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

14 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

15 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

16 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

16.1. MAKSUD DAN TUJUAN

16.1.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk:

Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Kenohan tahun 2025 dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan.

16.1.2 Tujuan

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Kenohan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Renja 2025 Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara secara garis besar disusun .dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD dan Renstra Perangkat Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN KENOHAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD.

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Kenohan memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni " Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia". Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Kenohan telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya dan telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu:

a. Menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Awal Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.

b. Menyusun Rancangan Renja Perangkat Daerah

   Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, pelaksanaan kinerja Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjang 4 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebagaimana dijabarkan dalam table berikut ini :

Tabel 1 / T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama OPD : Kecamatan Kenohan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja, Program (outcome), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
									Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	100	100	100	100%	100	100	100%
						Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan	86,36	86,36	86,36	86,36	100%	86,36	86,36	95%
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat								
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	25	9	9	9	1,79%	9	9	10S0%
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	2	111	111	111	95,15%	111	111	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja, Program (outcome), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
									Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif	100	100	100	100	87,24%			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan								
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	150	150	150	150	95,17%	150	150	100%
7	01	03	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	3	4	4	4	86,82%	4	4	100%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	9	9	9	9	0%	9	9	100%
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi								
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	9	9	9	9	0%	9	9	100%
X	XX	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78	78	78	78	83,06%			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja, Program (outcome), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
									Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X	XX	01.	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
X	XX	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	2	98,84%	2	2	100%
X	XX	01.	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2	2	2	2	96,00%	2	2	100%
X	XX	01.	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	12	12	25,38%	12	12	100%
X	XX	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel								
X	XX	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	12	23	23	23	82,10%	23	23	100%
X	XX	01.	2.02	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	12	12	92,71%	12	12	100%
X	XX	01.	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan								
X	XX	01.	2.03	01	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	2	12	12	12	97,66%	12	12	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja, Program (outcome), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
									Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X	XX	01.	2.04		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian								
X	XX	01.	2.04	01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40	25	25	25	99,30%	25	25	100%
X	XX	01.	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah								
X	XX	01.	2.06	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21	12	12	12	99,14%	21	21	100%
X	XX	01.	2.06	02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1020	200	200	200	32,15%	600	600	80%
X	XX	01.	2.06	03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5	5	5	5	0,00%	5	5	100%
X	XX	01.	2.06	04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	50	23	23	23	52,17%	23	23	75%
X	XX	01.	2.06	05	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	2	2	2	75,26%	2	2	100%
X	XX	01.	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan								
X	XX	01.	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	1	1	1	98,37%	2	2	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja, Program (outcome), Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
									Target Renja-PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X	XX	01.	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1	1	1	85,67%	1	1	100%
X	XX	01.	2.07	03	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	10	10	10	97,41%	10	10	200%
X	XX	01.	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan								
X	XX	01.	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	400	400	400	400	99,83%	400	400	100%
X	XX	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98	12	12	12	92,07%	12	12	100%
X	XX	01.	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	12	12	12	83,05%	12	12	200%
X	XX	01.	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	168	12	12	12	97,72%	12	12	100%
X	XX	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara								
X	XX	01.	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	4	4	4	4	93,68%	4	4	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagaian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Kenohan, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Kenohan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar.
b. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat.
c. Pelayanan yang bersifat penyedian data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
d. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kenohan selama kurun waktu tahun 2021 – 2026, yakni ada 4 Indikator Kinerja Utama

a. Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti;
b. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
c. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa; dan
d. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan.

Lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kenohan, dapat dilihat pada tabel 2 / Tabel T-C.30 dibawah ini :

Tabel 2 / T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kenohan

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			75	75	75	75	75	75	75	75	75	
2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			80	80	80	80	80	80	80	80	80	
3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa			35	35	35	35	35	35	0	35	35	
4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan			100	100	100	100	100	100	0	100	100	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

1. Permasalahan

Permasalahan Kecamatan Kenohan dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemahnya/belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan dan keamanan wilayah yang disebabkan :

a. Kualitas SDM yang belum memadai;
b. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
c. Terbatasnya Anggaran Pembangunan Skala Kecil Kecamatan;
d. Belum optimalnya peran Masyarakat dalam pembangunan.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Kenohan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bidang Pemerintahan:
    1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan :
        a) Bahwa masih banyak warga yang belum melakukan Perekaman KTP-eL;
        b) Masih banyak warga yang mutasi atau pindah tidak melapor sehingga kevalitan data penduduk sulit di capai.

    Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disetiap kesempatan selalu melaksanakan sosialiasi ke Kecamatan, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100%. Warga sudah mempunyai KK serta secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP-Elektronik, dan masih banyak KTP Elektronik yang belum jadi sehingga menimbulkan keresahan warga

    2) Pembinaan Perangkat memiliki Permasalahan:
        a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;

b) Sistim administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

Upaya yang telah dilakukan*:*

1. Perlu pelatihan peningkatan kapasitas SDM aparatur di Kecamatan;
2. Pengalokasian anggaran untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
3. Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

b. Bidang Pertanahan Dan Aset, Permasalahan:

1) Masih Banyak Kasus-kasus tumpang tindih kepemilikan tanah sehingga menimbulkan konflik.
2) Adanya SKPT ganda
3) Masyarakat yang memiliki SKPT tidak berada di wilayah setempat (luar kota) sehingga menyulitkan penyelesaian konflik kepemilikan tanah.

Upaya yang telah dilakukan

a. Dilakukan inventarisasi pnyelesaian kasus tanah secara berjenjang dan bertahap, dan melakukan pengukuran menggunakan GPS untuk mengurangi kesalahan ukuran dan batas- batas kepemilikan tanah.
b. Melakukan sosialisasi terhadap pemilik tanah yang bukti kepemilikanya hanya SKPT untuk melakukan pendaftaran ulang SKPT/pemutakhiran SKPT dari ukuran manual diganti dengan GPS.

c. Bidang Ekonomi Pembangunan & Pemberdayaan Perempuan,

Permasalahan :

1) Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang masih belum direalisasi;
2) Minimnya sosialisasi dari Stake Holder yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;

3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Upaya yang telah dilakukan*:*

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat dan lembaga - lembaga yang berada di tingkat Desa maupun kecamatan dengan stake holder atau dinas terkait dan pihak swasta yang ada diwilayah Kecamatan Kenohan.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan :

1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
2) Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
3) Sosialisasi KPR (kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang);
4) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda
5) karang taruna di masing-masing wilayah.

Upaya yang telah dilakukan *:*

a. Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
b. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Lurah untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masayarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;
c. Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik

maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;

d. Telah dicukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi proyek;

e. Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuh kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

e. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat, *Permasalahan:*

1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antispasi bencana di masing-masing lingkungan;
3) Masih tingginya penggunaan Miras dan Narkoba;
4) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Rekomendasi :

a. Mengadakan rapat pembinaan Linmas dan Koordinasi satgas yang lain;
b. Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana Pembentukan satuan Linmas tanggap bencana;
c. Mengadakan Sosialisasi secara berkala;
d. Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Awal RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuahan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/ tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan Pada tahun anggaran 2025 Rencana Kerja awal RKPD berdasarkan renstra dapat disampaikan sebagai lampiran/Tabel T-C. 31 berikut :

Tabel 3 / T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kenohan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kenohan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (75) Poin	5.714.400.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kenohan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (75) Poin	5.586.015.270	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		35.156.243	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		535.000.000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	140.000.000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Kegiatan	5.000.000	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	2 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Perubahan RKA-SKPD			
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	60.000.000	
1.1.5	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	30 Data	300.000.000	
1.1.6	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Berita Acara	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	70.000.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		3.237.976.394	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		3.351.710.399	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kenohan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/Bulan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kenohan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/Bulan	3.219.198.399	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	82.512.000	
1.2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Kenohan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Kenohan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	25.000.000	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan		34.200.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan		259.200.000	
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000	
1.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	150.000.000	
1.3.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1.3.4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD yang di Rekonsiliasi	2 Laporan		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD yang di Rekonsiliasi	12 Laporan	34.200.000	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah		159.280.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah		59.280.000	
1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kenohan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Unit		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kenohan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000	
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kenohan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kenohan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.000.000	
1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Kenohan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Jenis		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Kenohan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.280.000	
1.5.4	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Kegiatan		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	17.000.000	
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Pelaksana		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		445.000.000	
1.6.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kenohan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kenohan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	445.000.000	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		501.857.294	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		515.824.871	
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Lembar		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.900.000	
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	98 Rekening		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	118.967.577	
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kenohan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Unit		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kenohan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Laporan	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	168 Orang/Bulan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	388.957.294	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		200.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		250.000.000	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kenohan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kenohan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	50.000.000	
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kenohan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kenohan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	200.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kenohan	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP		2.475.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kenohan	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP		2.684.781.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kec. Kenohan	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Kenohan	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		400.000.000	
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10 Laporan	150.000.000	
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kenohan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kenohan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	250.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Kenohan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Kenohan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		115.000.000	
2.2.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15.000.000	
2.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	100.000.000	
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kenohan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan		2.475.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kenohan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat		2.169.781.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
			Camat								
2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	25 Berkas		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	769.781.000	
2.3.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Kegiatan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7 Laporan	1.400.000.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kenohan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif		230.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kenohan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif		586.000.000	
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kenohan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan		230.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kenohan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan		100.000.000	
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Kec. Kenohan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Kec. Kenohan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	9 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
	Pembangunan di Desa		Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Pembangunan di Desa		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	50.000.000	
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Kenohan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Kenohan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		486.000.000	
3.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Kenohan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Kenohan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	35 Lembaga Kemasyarakatan	486.000.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kenohan	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang melibatkan Kepolisian Negara		-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kenohan	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal, serta		175.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
			Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal, serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kenohan	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		-	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kenohan	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		175.000.000	
4.1.1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenohan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang melibatkan Kepolisian Republik Indonesi, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	175.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Kenohan			20.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Kenohan			190.000.000	
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kenohan			190.000.000	
5.1.1	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Kenohan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Kenohan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 Orang	190.000.000	
			Jumlah		6.893.469.931			Jumlah		9.221.796.270	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan masyarakat tentang program pembangunan terakomodir dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa/Kelurahan dan kecamatan setiap satu tahun sekali. Dari dokumen perencanaan yang ada, sebagian besar usulan masyarakat lebih di fokuskan kepada pembangunan fisik. Hal ini dapat dimengerti karena memang masyarakat sangat mendambakan sarana pelayanan umum yang layak, misalnya jalan , jembatan , gedung sekolah dan tempat ibadah. Usulan program dan kegiatan wilayah Kecamatan Kenohan yang utamanya mengedepankan bidang infrastruktur dan umumnya dalam bidang pendidikan.

Keberhasilan pembangunan tidaklah semata - mata ditentukan oleh banyaknya kegiatan yang dilakukan atau diprogramkan. Alasan yang paling lazim untuk pernyataan tersebut adalah keterbatasan dana dan sumberdaya pedukung lainnya. Oleh karena itu perlu dalam satu perencanaan memilah kegiatan mana yang mendesak dan segera dibutuhkan masayarakat dan kegiatan mana yang dapat ditunda. Dengan kata lain dalam setiap perencanaan pembangunan perlu menyusun prioritas program kegiatan.

Prioritas program pembangunan Kecamatan Kenohan Tahun 2025 mengacu pada arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang secara umum sebagai berikut :

a. Peningkatan kinerja Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
b. Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan/Mikro.
c. Peningkatan Fungsi Kecamatan bidang pembangunan skala kecil sesuai permasalahan Kecamatan.

Namun demikian kegiatan lain yang bersifat non fisik masih mendapat apresiasi dari masyarakat, misalnya pelatihan keterampilan, bantuan usaha kecil, walaupun volumenya kecil. Selanjutnya, untuk lebih detail tentang usulan program dan kegiatan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk usulan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/Pengampu
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1				Desa Tubuhan	Semenisasi Jembatan RT.06 Desa Tubuhan		200.000.000,00		APBD			Kecamatan
2				Desa Tubuhan	Semenisasi Jembatan RT.07 Desa Tubuhan		200.000.000,00		APBD			Kecamatan
3				Desa Tubuhan	Semenisasi Jembatan RT.08 Desa Tubuhan		200.000.000,00		APBD			Kecamatan
4				Desa Kahala	Semenisasi Jalan Inpres Desa Kahala RT.001		200.000.000,00		APBD			Kecamatan
5				Desa Kahala	Parit Beton Desa Kahala RT.005		200.000.000,00		APBD			Kecamatan
6				Desa Kahala	Parit Beton Desa Kahala RT.008		200.000.000,00		APBD			Kecamatan
7				Desa Kahala	Bantuan Dana Kegiatan "Kenohan Cup" Desa Kahala RT.008		200.000.000,00		APBD			Kecamatan
8				Desa Teluk Muda	Semenisasi Jalan Jembatan Ulin RT. 06 Desa Teluk Muda		200.000.000,00		APBD			Kecamatan

9				Desa Teluk Muda	Lanjutan Pembangunan Jambatan Titian Ulin RT.06 Desa Teluk Muda		200.000.000,00		APBD			Kecamatan
10				Desa Tuana Tuha	Pembangunan BPU Desa Tuana Tuha		200.000.000,00		APBD			Kecamatan
11				Desa Tuana Tuha	Pembangunan Gedung Bulu Tangkis Desa Tuana Tuha		200.000.000,00		APBD			Kecamatan
12				Desa Tuana Tuha	Pembangunan Gedung TK AL-Quran Desa Tuana Tuha		200.000.000,00		APBD			Kecamatan
13				Desa Kahala Ilir	Pengadaan bibit Ternak Kerbau Desa Kahala Ilir		200.000.000,00		APBD			Kecamatan
14				Desa Kahala Ilir	Pengadaan Lampu PJU Desa Kahala Ilir		200.000.000,00		APBD			Kecamatan
15				Desa Kahala Ilir	Pengadaan Alat Kesenian Desa Kahala Ilir		200.000.000,00		APBD			Kecamatan
16				Desa Kahala Ilir	Rehab Bangunan TK/TPA Desa Kahala Ilir		200.000.000,00		APBD			Kecamatan
17				Desa Lamin Telihan	Pembangunan teras gedung TK Desa Lamin Telihan		200.000.000,00		APBD			Kecamatan
18				Desa Lamin Telihan	Semensasi Halaman Kantor Desa Desa Lamin Telihan		200.000.000,00		APBD			Kecamatan

19				Desa Lamin Telihan	Pembangunan Gedung TK Dusun Malong Desa Lamin Telihan		200.000.000,00		APBD			Kecamatan
20				Desa Lamin Pulut	SEMENISASI JALAN RT. 001 Desa Lamin Pulut		200.000.000,00		APBD			Kecamatan
21				Desa Lamin Pulut	SEMENISASI JALAN RT. 002 Desa Lamin Pulut		200.000.000,00		APBD			Kecamatan
22				Desa Lamin Pulut	PEMBANGUNAN TRIBUN SEPAK BOLA Desa Lamin Pulut		200.000.000,00		APBD			Kecamatan
23				Desa Semayang	Semenisasi halaman parkir RT 007 Desa Semayang		200.000.000,00		APBD			Kecamatan
24				Desa Semayang	Pelebaran Jalan Jembatan RT 001 Desa Semayang		200.000.000,00		APBD			Kecamatan
25				Desa Semayang	Pembangunan Rumah Singgah Desa Semayang		200.000.000,00		APBD			Kecamatan
26				Desa Semayang	Pelebaran Jalan Jembatan RT 002 Desa Semayang		200.000.000,00		APBD			Kecamatan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Kenohan Tahun Anggaran 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Kenohan dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut

a) Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan

pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

b) Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana secara teknokratis prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, dimana kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan : *Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.*

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Kenohan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD Kecamatan Kenohan Tahun 2021-2026.

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelummnya Kecamatan Kenohan mempunyai tujuan yaitu "*Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel",* yang artinya Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah.

Meningkatkan sarana infrastruktur sebagai akses masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan partisipasi masyarakat / perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbangcam, meningkatkan kelancaran proses administrasi kependudukan dan meningkatkan keamanan lingkungan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu "*Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan*", yang artinya meningkatnya tertib administrasi pemerintah dan kualitas pelayanan publik dan meningkatnya Interkoneksitas antar wilayah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis (Renstra) Kantor Camat Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 – 2026. Pada dasarnya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Kantor Camat Keohan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025. Target kinerja mereprensentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra), Kantor Camat Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Kantor Camat Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan Pelayanan Kantor Camat Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai tabel berikut:

Tabel TC-33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kenohan

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kec. Kenohan	B (75) Poin	B (75) Poin	5.586.015.270	DBH		Poin	B (75)	5.586.015.270
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kenohan			535.000.000	DBH				535.000.000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kenohan	3 Dokumen	3	140.000.000	DBH		Dokumen	3	140.000.000
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Kenohan	2 Kegiatan	2	5.000.000	DBH		Kegiatan		5.000.000
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Kenohan	2 Dokumen	2	5.000.000	DBH		Dokumen		5.000.000
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kenohan	1 Laporan	1	60.000.000	DBH		Laporan		60.000.000

					Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kec. Kenohan	30 Data	30	300.000.000	DBH		Data		300.000.000
					Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kenohan	20 Berita Acara	20	25.000.000	DBH		Berita Cara		25.000.000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kenohan	2 Laporan	2	70.000.000	DBH		Laporan		70.000.000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Kec. Kenohan			3.351.710.399	DBH				3.351.710.399
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kenohan	24 Orang/Bulan	24	3.219.198.399	DBH		Orang/Bulan		3.219.198.399
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Kec. Kenohan	1 Laporan	1	25.000.000	DBH		Laporan		25.000.000

						Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Kec. Kenohan	12 Laporan	12	82.512.000	DBH		Laporan		82.512.000
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Kenohan	2 Dokumen	2	25.000.000	DBH		Dokumen		25.000.000
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Kec. Kenohan			259.200.000	DBH				259.200.000
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kenohan	1 Dokumen	1	25.000.000	DBH		Dokumen		25.000.000
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kenohan	1 Dokumen	1	150.000.000	DBH		Dokumen		150.000.000
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kenohan	2 Laporan	2	50.000.000	DBH		Laporan		50.000.000
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD yang di Rekonsiliasi	Kec. Kenohan	12 Laporan	12	34.200.000	DBH		Laporan		34.200.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kenohan			59.280.000	DBH				59.280.000
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Kenohan	1 Paket	1	35.000.000	DBH		Paket		35.000.000
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Kenohan	2 Paket	2	5.000.000	DBH		Paket		5.000.000

					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Kenohan	1 Paket	1	2.280.000	DBH		Paket		2.280.000
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Kenohan	2 Dokumen	2	17.000.000	DBH		Dokumen		17.000.000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kenohan	50 Laporan	50	100.000.000	DBH		Laporan		100.000.000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Kenohan			445.000.000	DBH				445.000.000
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Kenohan	1 Unit	1	445.000.000	DBH		Unit		445.000.000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kec. Kenohan			515.824.871	DBH				515.824.871
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kenohan	12 Laporan	12	2.900.000	DBH		Laporan		2.900.000
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Kenohan	2 Laporan	2	118.967.577	DBH		Laporan		118.967.577
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kenohan	2 Laporan	2	5.000.000	DBH		Laporan		5.000.000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kec. Kenohan	12 Laporan	12	388.957.294	DBH		Laporan		388.957.294

						Kantor yang Disediakan											
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kec. Kenohan			250.000.000	DBH				250.000.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Kenohan	2 Unit	2	50.000.000	DBH		Unit		50.000.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Kenohan	14 Unit	14	200.000.000	DBH		Unit		200.000.000
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Kec. Kenohan			2.684.781.000	DBH				2.684.781.000
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Kenohan			400.000.000	DBH				400.000.000
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Kec. Kenohan	10 Laporan	10	150.000.000	DBH		Laporan		150.000.000

						Daerah dan Instansi Vertikal Terkait										
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kenohan	12 Dokumen	12	250.000.000	DBH		Dokumen		250.000.000
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Kenohan			115.000.000	DBH				115.000.000
					Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenohan	1 Laporan	1	15.000.000	DBH		Laporan		15.000.000
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenohan	2 Laporan	2	100.000.000	DBH		Laporan		100.000.000
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kec. Kenohan			2.169.781.000	DBH				2.169.781.000
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec. Kenohan	4 Laporan	4	769.781.000	DBH		Laporan		769.781.000
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Kec. Kenoha	7 Laporan	7	1.400.000.000	DBH		Laporan		1.400.000.000

					dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	n										
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif	Kec. Kenohan			586.000.000	DBH				586.000.000
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kec. Kenohan			100.000.000	DBH				100.000.000
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kenohan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9	50.000.000	DBH		Lembaga Kemasyarakatan		50.000.000
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenohan	2 Laporan	2	50.000.000	DBH		Laporan		50.000.000
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Kenohan			486.000.000	DBH				486.000.000
					Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec. Kenohan	35 Lembaga Kemasyarakatan	35	486.000.000	DBH		Lembaga Kemasyarakatan		486.000.000
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Kec. Kenohan			175.000.000	DBH				175.000.000

						Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal, serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kenohan			175.000.000	DBH				175.000.000
					Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Kenohan	2 Laporan	2	175.000.000	DBH		Laporan		175.000.000
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kec. Kenohan			190.000.000	DBH				190.000.000
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kenohan			190.000.000	DBH				190.000.000
					Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Kenohan	1 Orang	1	190.000.000	DBH		Orang		190.000.000

						Jumlah				9.221.796.270						9.221.796.270

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana strategis Kecamatan Kenohan Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun.

Rencana Kerja (Renja) ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan Program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kenohan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Kenohan merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan Kecamatan pada Tahun 2025. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Kenohan.

Demikian pula dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Kenohan ini juga masih terdapat kekurang-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Kenohan semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ddd.RENJA KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya berupa dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kembang Janggut dipakai sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kembang Janggut yang selanjutnya akan dipakai sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Kembang Janggut. Muatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome.*

Rencana Kerja Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2025 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu, b) Rumusan status kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini, c) Rumusan peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan Renja, d) Rumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan, e) pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana, f) rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja, g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan, h) prakiraan maju pendanaan untuk tahun

berikutnya, i) kejelasan siapa yang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran. Melalu pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan kerangka berfikir yang komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan melalui a) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, b) kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur Pemerintah dan non pemerintah, c) keterwakilan yang mewadai dari seluruh segmen masyarakat terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal, d) berperan aktif pada pelaksanaan musrenbang RKPD dari segi penerapan perencanaan partisipatif, e) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan serta prioritas program.

Pendekatan politis, penyusunan Renja Kecamatan Kembang Janggut mengacu pada RKPD dan RPJMD yang merupakan bentuk konsekuensi politis antara Bupati/Wakil Bupati terpilih. Pendekatan ini juga tercermin pada keterlibatan aktif DPRD dalam musrenbang Kecamatan dan kabupaten termasuk hasil sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD, kemudian dokumen RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan sampai RAPBD.

Pendekatan top down, perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui rapat koordinasi dan musrenbang mulai tingkat nasional, provinsi dan kabupaten juga tujuan *globalMDGs.* Pendekatan ini tercermin pada:

a. sinergi dengan program prioritas nasionaldan daerah;
b. konsisten pada RPJMD, RKPD dan Renstra Kecamatan Kembang Janggut, Konsisten dengan dokumen RTRW daerah;
c. penanganan masalah dengan pendekatan holistic dan pendekatan sistem.

Pendekatan *bottom-up,* perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dan diselaraskan melalui musrenbang, konsisten terhadap visi misi RPJMD serta kesepakatan masyarakat tentang prioritas

pembangunan dan hasil forum SKPD.

Penyusunan Renja ini disesuaikan dengan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja ini memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kecamatan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9 Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10 Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

14 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

15 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

16 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kembang Janggut;
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Kembang Janggut.

Tujuan

1. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan kecamatan Kembang Janggut Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025;

2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Kembang Janggut dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD dan Renstra Perangkat Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN
- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
TAHUN LALU

Penyusunan dan Pelaksanaan Renja mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan serta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Adapun *tugas pokok dan fungsi dari Kantor Kecamatan Kembang Janggut* adalah:

A. Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Fungsi Utama

1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan;
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasiltas pelayanan umum;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
10. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;

11. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan, pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan - kegiatan lain di lingkungan Kecamatan;
12. Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan serta Lembaga Kemasyarakatan.

C. Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN KEMBANG JANGGUT TAHUN 2025

No	Uraian	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Sumber Data
1	2	3	4	6	10
Tujuan					
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	B (80)	Kantor Camat Kembang Janggut (Seksi Pelayanan Umum)
Sasaran					
2	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kantor Camat Kembang Janggut (Seksi Pelayanan Umum)
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	90	Kantor Camat Kembang Janggut (Seksi Trantibum)
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	13	Kantor Camat Kembang Janggut (Seksi PMD dan Pemerintahan)

		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Persen	4	Kantor Camat Kembang Janggut (Seksi Pelayanan Umum)

FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN KEMBANG JANGGUT TAHUN 2022-2026

No	Uraian	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4	5
Tujuan				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	Nilai IKM diperoleh dari hasil perhitungan atas Survey yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kembang Janggut terhadap pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Acuan yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik dan Keputusan MENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004

Komponen Penilaian Terdiri Dari

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00	C (Kurang Baik)	: 65,00 - 76,60
B (Baik)	: 76,61 - 88,30	D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99

Unsur Pelayanan :

No.	Unsur Pelayanan
U1	Kesesuaian Persyaratan
U2	Prosedur Pelayanan
U3	Kecepatan Pelayanan

U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya
U5	Kesesuaian Pelayanan
U6	Kompetensi Petugas
U7	Perilaku Petugas Pelayanan
U8	Penanganan Pengaduan
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4	5
Sasaran				
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	Jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan x 100
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	Jumlah kasus yang ditangani dibagi total kasus trantibun di Kecamatan x 100
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	Nilai Total PADes tahun berjalan (N) dikurang nilai Total PADes tahun sebelumnya (N-1) dibagi Nilai Total PADes tahun sebelumnya (N-1) dikali 100
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	Nilai Total PAD Kecamatan tahun berjalan (N) dikurang nilai Total PAD Kecamatan tahun sebelumnya (N-1) dibagi Nilai Total PAD Kecamatan tahun sebelumnya (N-1)

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra

Evaluasi Anggaran Kecamatan Kembang Janggut tahun lalu (2023) secara rinci dapat dilihat ada Tabel 2.1 / Tabel T-C.29 dibawah ini:

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama OPD : Kecamatan Kembang Janggut

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target	Realisasi	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024 TW.2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

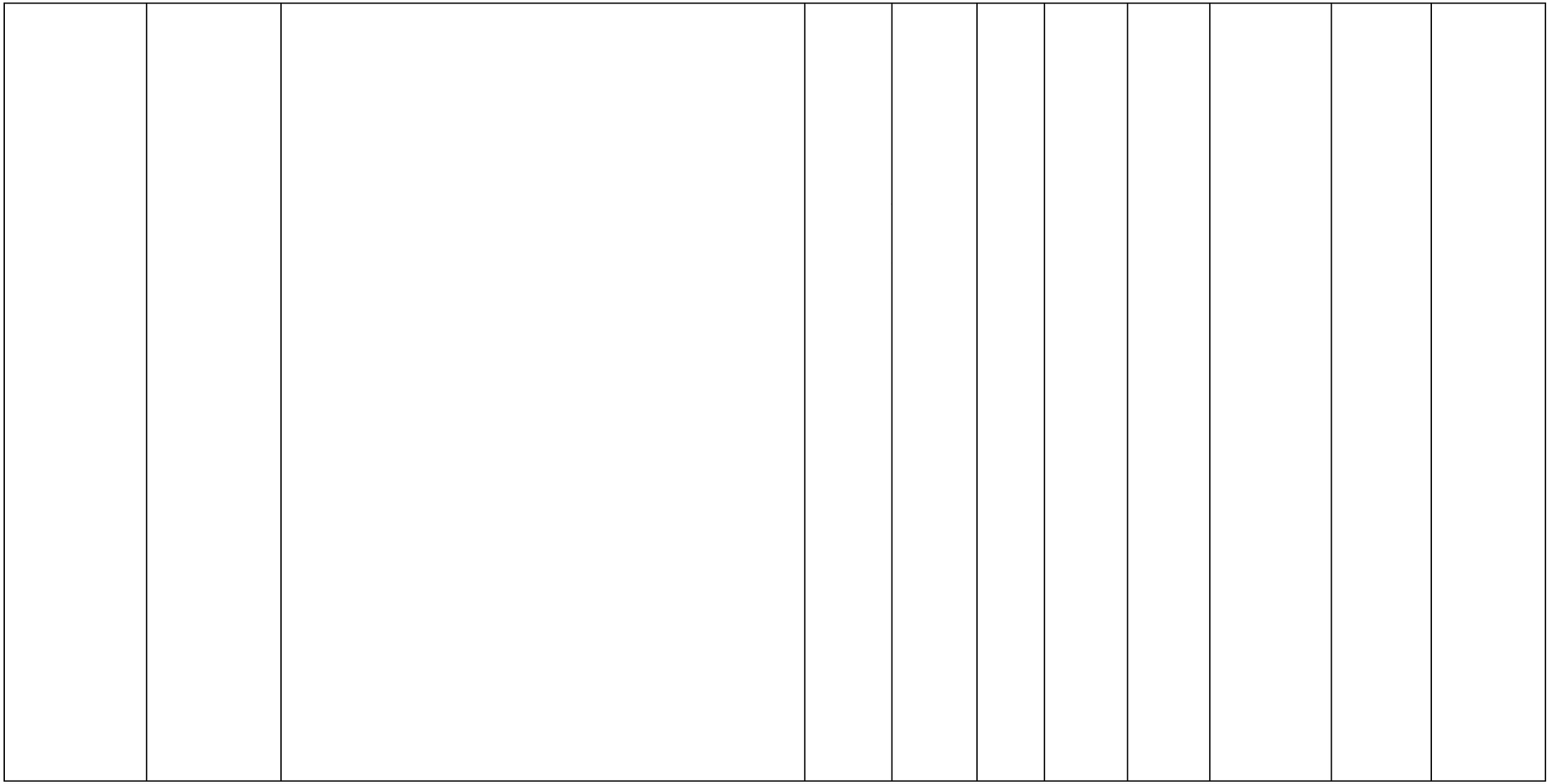

1				2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	100%
						Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan	Persen	90,91	86,36	86,36	86,36	100%	86,36	86,36	95%
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	115	0	23	23	100%	23	46	40%
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kali	60	0	12	12	100%	12	24	40%
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	55	0	11	11	100%	11	22	40%
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kali	60	0	12	0	0%	12	12	20%

7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kali	60	0	12	12	100%	12	24	40%
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	12	2	2	2	100%	2	6	50%
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	Berkas	300	50	50	50	100%	50	150	50%
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	kegiatan	8	1	3	3	100%	1	5	63%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	72	12	12	12	100%	12	36	50%
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang	50	50	30	50	167%	50	150	300%

7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana oleh pihak Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kegiatan	11	0	11	11	100%	11	22	200%
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	Kegiatan	2	2	2	2	100%	2	2	100%
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	0	0	0	0%	100	33,33	33%
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	26	0	0	0	0%	4	4	15%
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kegiatan	13	0	0	0	0%	4	4	31%
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kegiatan	13	0	0	0	0%	4	4	31%

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	0	0	0	0%	100	100	100%
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	20	0	0	0	0%	5	5	25%
7	01	05	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kegiatan	1	0	0	0	0%	1	1	100%
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kegiatan	3	0	0	0	0%	3	3	100%
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kegiatan	1	0	0	0	0%	1	1	100%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	75	0	11	11	100%	45	56	75%
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	11	0	11	11	100%	11	22	200%
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa	11	0	11	11	100%	11	22	200%

X	XX	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78	0	70	99	141%	74	173	222%
X	XX	01.	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	320	44	44	44	100%	10	98	31%
X	XX	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	60	10	10	10	100%	10	30	50%
X	XX	01.	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	dokumen	42	7	7	7	100%	7	21	50%
X	XX	01.	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	28	0	0	0	0%	7	7	25%
X	XX	01.	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	dokumen	42	7	7	7	100%	7	21	50%
X	XX	01.	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	28	0	0	0	0%	7	7	25%
X	XX	01.	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	120	20	20	20	100%	20	60	50%
X	XX	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	laporan	222	36	37	37	100%	37	110	50%
X	XX	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	orang	35	35	35	35	100%	35	35	100%
X	XX	01.	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	laporan	144	24	24	24	100%	24	72	50%
X	XX	01.	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	30	5	5	5	100%	5	15	50%
X	XX	01.	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	67	7	12	12	100%	12	31	46%

X	XX	01.	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Unit	225	0	5	5	100%	50	55	24%
X	XX	01.	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	20	0	0	0	0%	5	5	25%
X	XX	01.	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	Unit	20	0	0	0	0%	5	5	25%
X	XX	01.	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	laporan	5	0	5	5	100%	5	10	200%
X	XX	01.	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	Laporan	25	0	5	5	100%	5	10	40%
X	XX	01.	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian atau Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	orang	40	36	36	36	100%	36	108	270%
X	XX	01.	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Stel	196	36	36	36	100%	40	112	57%
X	XX	01.	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	jenis	9	7	7	7	100%	9	23	256%
X	XX	01.	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	30	20	20	20	100%	5	45	150%
X	XX	01.	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	30	5	5	5	100%	5	15	50%

X	XX	01.	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	jenis	20	0	0	0	0%	5	5	25%
X	XX	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis	90	15	15	15	100%	15	45	50%
X	XX	01.	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Unit	1000	1000	1000	1000	100%	1000	3000	300%
X	XX	01.	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Buku	30	0	5	5	100%	5	10	33%
X	XX	01.	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitas	Kali	60	0	12	12	100%	12	24	40%
X	XX	01.	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kali	72	12	12	12	100%	12	36	50%
X	XX	01.	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai	80	41,07	70	41,64	59%	70	51	64%
X	XX	01.	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	23	0	8	8	100%	2	10	43%
X	XX	01.	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	8	0	1	1	100%	1	2	25%
X	XX	01.	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	11	0	7	7	100%	1	8	73%
X	XX	01.	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	4	0	0	0	0%	1	1	25%
X	XX	01.	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
X	XX	01.	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	bulan	12	0	12	12	100%	12	24	200%

X	XX	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	12	12	100%	12	36	300%
X	XX	01.	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	0	12	12	100%	12	24	200%
X	XX	01.	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12	12	12	100%	12	36	300%
X	XX	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	393	3	78	78	100%	50	131	33%
X	XX	01.	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Unit	10	0	10	10	100%	10	20	200%
X	XX	01.	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Unit	3	3	3	3	100%	3	9	300%
X	XX	01.	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	unit	30	0	30	30	100%	30	60	200%
X	XX	01.	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	5	0	5	5	100%	25	30	600%
X	XX	01.	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	unit	25	0	5	5	100%	5	10	40%
X	XX	01.	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	25	0	5	5	100%	5	10	40%

					Bangunan Lainnya	yang dipemelihara/direhabilitasi									

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagaian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Kembang Janggut, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Kembang Janggut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar.
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat.
3. Pelayanan yang bersifat penyedian data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Kelurahan dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kembang Janggut selama kurun waktu tahun 2021 – 2026, yakni ada 4 Indikator Kinerja Utama

1. Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti;
2. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa; dan
4. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan.

Lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kembang Janggut, dapat dilihat pada tabel 2.2 / Tabel T-C.30 dibawah ini :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kembang Janggut

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	100	100	100	100	Realisasi capaian tahun 2024 per Maret (Triwulan 2)
2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			65	70	80	90	100	100	100	90	100	
3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa			5	7	10	13	15	-17,23	0	13	15	
4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan			1	2	3	4	5	0	0	4	5	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

1. Permasalahan

Permasalahan Kecamatan Kembang Janggut dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemahnya/belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan dan keamanan wilayah yang disebabkan :

a. Kualitas SDM yang belum memadai;
b. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
c. Terbatasnya Anggaran Pembangunan Skala Kecil Kecamatan;
d. Belum optimalnya peran Masyarakat dalam pembangunan.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Kembang Janggut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Bidang Pemerintahan:

1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan :
   a) Bahwa masih banyak warga yang belum melakukan Perekaman KTP-eL;
   b) Masih banyak warga yang mutasi atau pindah tidak melapor sehingga kevalidan data penduduk sulit di capai.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disetiap kesempatan selalu melaksanakan sosialiasi ke Kecamatan, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100%. Warga sudah mempunyai KK serta secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP-Elektronik, dan masih banyak KTP Elektronik yang belum jadi sehingga menimbulkan keresahan warga

2) Pembinaan Perangkat memiliki Permasalahan:
   a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Aparatur Kelurahan serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;

b) Sistim administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

Upaya yang telah dilakukan*:*

1. Perlu pelatihan peningkatan kapasitas SDM aparatur di Kecamatan;
2. Pengalokasian anggaran untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
3. Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

B. Bidang Pertanahan Dan Aset, Permasalahan:

a. Masih Banyak Kasus-kasus tumpang tindih kepemilikan tanah sehingga menimbulkan konflik.
b. Adanya SKPT ganda
c. Masyarakat yang memiliki SKPT tidak berada di wilayah setempat (luar kota) sehingga menyulitkan penyelesaian konflik kepemilikan tanah.

Upaya yang telah dilakukan

Dilakukan inventarisasi pnyelesaian kasus tanah secara berjenjang dan bertahap, dan melakukan pengukuran menggunakan GPS untuk mengurangi kesalahan ukuran dan batas- batas kepemilikan tanah.

Melakukan sosialisasi terhadap pemilik tanah yang bukti kepemilikanya hanya SKPT untuk melakukan pendaftaran ulang SKPT/pemutakhiranSKPT dari ukuran manual diganti dengan GPS.

C. Bidang Ekonomi Pembangunan & Pemberdayaan Perempuan,

Permasalahan :

a. Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang masih belum direalisasi;
b. Minimnya sosialisasi dari Stake Holder yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
c. Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Upaya yang telah dilakukan:

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat dan lembaga - lembaga yang berada di tingkat Desa atau Kelurahan maupun kecamatan dengan stake holder atau dinas terkait dan pihak swasta yang ada diwilayah Kecamatan Kembang Janggut.

D. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan :

a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
b. Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
c. Sosialisasi KPR (kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang);
d. Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam
e. karang taruna di masing-masing wilayah.

Upaya yang telah dilakukan :

a. Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
b. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Lurah untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masayarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;
c. Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
d. Telah dicukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi proyek;

e. Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuh kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

E. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat, Permasalahan:

a. Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
b. Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antispasi bencana di masing-masing lingkungan;
c. Masih tingginya penggunaan Miras dan Narkoba;
d. Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Rekomendasi :

1. Mengadakan rapat pembinaan Linmas dan Koordinasi satgas yang lain;
2. Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana Pembentukan satuan Linmas tanggap bencana;
3. Mengadakan Sosialisasi secara berkala;
4. Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Review rancangan awal RKPD Kecamatan Kembang Janggut adalah perbandingan antara program/kegiatan yang tertuang ke dalam rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan SKPD atau adanya perubahan program kegiatan yang tidak sesuai dengan tupoksi SKPD.

Review secara rinci dapat disampaikan sebagaimana dalam Tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kembang Janggut

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	130.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecama	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	1.251.739.000	
			Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan	Persen	86,36	200.000.000			Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan	Persen	86,36	2.680.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	23	95.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	24	400.000.000	
1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kali	12	50.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kali	12	150.000.000	Fasilitasi Kegiatan Erau dan Stunting
1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	11	45.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	12	250.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan HUT-RI Dikecamatan
1.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kegiatan	0	-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kegiatan	2	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	0	-	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	2	100.000.000	Fasilitasi Kegiatan Pramuka dan Operasional Pokjanal Posyandu
1.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kali	0	5.000.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kali	0	-	
1.3	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kali	0	5.000.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kali	0	-	
1.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kembang Janggut	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kwenangan Camat	Kegiatan	2	230.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kembang Janggut	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	3.431.739.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	Berkas	50	30.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kegiatan	3	751.739.000	Pelimpahan Kewenangan Terkait Penanganan Darurat Bencana, Pengelolaan Sampah, dan Pelayanan PATEN
1.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	kegiatan	1	200.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	kegiatan	13	2.680.000.000	Pelimpahan Kewenangan Terkait Peningkatan Insfratruktur Jalan dan Jembatan
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kembang Janggut	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif	Pesentase	100	310.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kembang Janggut	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif	Pesentase	100	586.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	12	310.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	12	100.000.000	
2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang	30	35.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang	50	50.000.000	
2.1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana oleh pihak Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kegiatan	11	25.000.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana oleh pihak Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kegiatan	0	-	
2.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	Kegiatan	3	250.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	2	50.000.000	Fasilitasi Lomba Desa dan Bulan Bakti Gotong Royong

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Kegiatan Lembaga yang dilaksanakan	Kegiatan	0	-	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Kegiatan Lembaga yang dilaksanakan	Kegiatan	5	486.000.000	
2.2	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang dilaksanakan	Kegiatan	0	-	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang dilaksanakan	Kegiatan	5	486.000.000	Fasilitasi Linmas, Keggiatan HKG-PKK, Operasional PKK, Forum Anak dan Jambore PAUD.
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kembang Janggut	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	persen	100	55.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kembang Janggut	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	persen	100	175.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	2	55.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	8	175.000.000	
3.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan pemerintahan yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kegiatan	1	40.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan pemerintahan yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kegiatan	0	-	
3.1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kegiatan	1	15.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Kembang Janggut	Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kegiatan	4	175.000.000	Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Fasilitasi Kegiatan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Safari Ramadhan
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Kembang Janggut	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	290.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Kembang Janggut	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	220.000.000	
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	5	290.500.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	3	220.000.000	
4.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kegiatan	35	110.000.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	0	-	
4.1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	Kegiatan	75	172.500.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	Kegiatan	1	210.000.000	Fasilitasi Kegiatan MTQ

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional		Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional				Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional		Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional				
4.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kegiatan	1	8.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kegiatan	4	10.000.000	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kembang Janggut	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	45	50.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kembang Janggut	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	45	50.000.000	
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	11	50.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	11	50.000.000	
5.1	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kec. Kembang Janggut	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa	11	50.000.000	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kec. Kembang Janggut	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa	11	50.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kembang Janggut	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	B (74)	6.410.815.012	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kembang Janggut	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	B (70)	7.990.814.578	
6.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	58	65.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	26	605.000.000	
6.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	10	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	140.000.000	Penyusunan Dokumen Renstra, Renja dan Renja Perubahan
6.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	dokumen	7	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	dokumen	2	5.000.000	Penyusunan Dokumen RKA dan DPA
6.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	7	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	2	5.000.000	Penyusunan Dokumen RKA Perubahan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													dan DPA Perubahan
6.1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	dokumen	7	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	dokumen	0	-	
6.1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	7	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	0	-	
6.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	7	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	20	70.000.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan	0	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan	4	60.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.1	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Laporan Data Statistik Sektoral Daerah	laporan	0	-	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Laporan Data Statistik Sektoral Daerah	laporan	1	300.000.000	
6.1	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Laporan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	laporan	0	-	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Laporan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	laporan	1	25.000.000	
6.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	laporan	37	4.529.871.628	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	laporan	14	4.930.371.194	
6.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kembang Janggut	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	orang	35	4.334.871.628	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kembang Janggut	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	orang	33	4.715.371.194	Perubahan Pagu Dikarenakan Ada Penambahan Mutasi Masuk Pegawai

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	laporan	24	15.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	laporan	0	-	
6.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	5	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	25.000.000	
6.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	0	165.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12	165.000.000	Honorarium Bulanan Untuk PA, PPTK, PPK, dan Bendahara Pengeluaran
6.2	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	laporan	0	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	laporan	1	25.000.000	
6.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Kembang Jangg	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	unit	55	32.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggu	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	unit	14	255.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ut						t					
6.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	5	5.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	4	25.000.000	
6.3	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	unit	5	7.500.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	unit	4	150.000.000	
6.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	0	-	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1	50.000.000	
6.3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	laporan	5	10.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	laporan	4	30.000.000	
6.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kembang Jangg	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	Laporan	5	10.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kembang Janggu	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	Laporan	0	-	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ut						t					
6.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian atau Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	orang	40	75.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian atau Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	orang	43	75.000.000	
6.4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Stel	40	75.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Stel	43	75.000.000	
6.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	jenis	9	410.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	jenis	9	410.500.000	
6.5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	1	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit	1	55.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	55.000.000	
6.5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	unit	1	20.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	1	20.000.000	
6.5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	unit	1	58.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1	58.000.000	
6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	unit	1	7.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	7.500.000	
6.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	jenis	5	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	5	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitas	kali	12	15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitas	Bulan	12	15.000.000	
6.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	kali	12	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Laporan	12	200.000.000	
6.5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	jenis	8	45.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	Dokumen	1	45.000.000	
6.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	3	400.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	3	890.000.000	
6.6	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	1	150.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	2	640.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	1	150.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	1	150.000.000	
6.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	1	100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	1	100.000.000	
6.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12	307.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12	387.500.000	
6.7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kembang Janggut	Jumlah surat menyurat	bulan	12	2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kembang Janggut	Jumlah surat menyurat	bulan	12	2.500.000	
6.7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kembang Janggut	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	90.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kembang Janggut	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	170.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.7	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kembang Janggut	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	15.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kembang Janggut	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	15.000.000	
6.7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kembang Janggut	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	200.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kembang Janggut	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	200.000.000	
6.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yg pelihara	unit	78	590.443.384	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yg pelihara	unit	45	437.443.384	
6.8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	unit	10	203.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	unit	10	50.000.000	
6.8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya	unit	3	167.443.384	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya	unit	3	167.443.384	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Lapangan		Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				Lapangan		Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				
6.8	Pemeliharaan Mebel	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Mebel yang dipelihara	unit	30	10.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Mebel yang dipelihara	unit	30	10.000.000	
6.8	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	25	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	1	10.000.000	
6.8	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/ direhabilitasi	unit	5	100.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/ direhabilitasi	unit	1	100.000.000	
6.8	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipemelihara/ direhabilitasi	unit	5	100.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kembang Janggut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipemelihara/ direhabilitasi	unit	1	100.000.000	
			Jumlah			7.446.315			Jumlah			12.953.553.578	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua	Targe	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						.012							

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan masyarakat tentang program pembangunan terakomodir dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa/Kelurahan dan kecamatan setiap satu tahun sekali. Dari dokumen perencanaan yang ada, sebagian besar usulan masyarakat lebih di fokuskan kepada pembangunan fisik. Hal ini dapat dimengerti karena memang masyarakat sangat mendambakan sarana pelayanan umum yang layak, misalnya jalan , jembatan , gedung sekolah dan tempat ibadah. Usulan program dan kegiatan wilayah Kecamatan Kembang Janggut yang utamanya mengedepankan bidang infrastruktur dan umumnya dalam bidang pendidikan.

Keberhasilan pembangunan tidaklah semata - mata ditentukan oleh banyaknya kegiatan yang dilakukan atau diprogramkan. Alasan yang paling lazim untuk pernyataan tersebut adalah keterbatasan dana dan sumberdaya pedukung lainnya. Oleh karena itu perlu dalam satu perencanaan memilah kegiatan mana yang mendesak dan segera dibutuhkan masayarakat dan kegiatan mana yang dapat ditunda. Dengan kata lain dalam setiap perencanaan pembangunan perlu menyusun prioritas program kegiatan.

Prioritas program pembangunan Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2022 mengacu pada arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang secara umum sebagai berikut :

a. Peningkatan kinerja Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
b. Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan/Mikro.
c. Peningkatan Fungsi Kecamatan bidang pembangunan skala kecil sesuai permasalahan Kecamatan.

Namun demikian kegiatan lain yang bersifat non fisik masih mendapat apresiasi dari masyarakat, misalnya pelatihan keterampilan, bantuan usaha kecil, walaupun volumenya kecil. Selanjutnya, untuk lebih detail tentang usulan program dan kegiatan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk usulan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.4/ Tabel T-C.32 dibawah ini:

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
1	1328747	Penyediaan Kapal/Perahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT	Kurangnya alat Penunjang Nelayan untuk mencari ikan (Perahu dan alat tangkap ikan)	Long Beleh Haloq, Kab. Kutai Kartanegara	Long Beleh Haloq	-
2	1328786	Penyediaan Mesin Kapal/Perahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT	Kurangnya mesin Ces (Ketinting) buat nelayan untuk mencari ikan	Desa Long Beleh Haloq, Kab. Kutai Kartanegara	Long Beleh Haloq	-
3	1332482	Event Olahraga Wisata, Tantangan dan Pertualangan	Tidak adanya tempat wisata atau wahana bermain keluarga	Desa Long Beleh Haloq, Kab. Kutai Kartanegara	Long Beleh Haloq	-
4	1332550	Event Olahraga Wisata, Tantangan dan Pertualangan	terdapat Pulau/rawa di desa long beleh yang berpotensi dijadikan tempat wisata yang perlu dinormalisasikan karena tempat/Pulau tersebut belum tetata rapi	Desa Long Beleh Haloq, Kab. Kutai Kartanegara	Long Beleh Haloq	-
5	1332639	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Tidak adanya gedung Posyandu di Desa Long Haloq, sehingga ketika ada kegiatan posyandu selalu dilakukan di gedung Kantor(BPU) Kantor Desa	Long Beleh Haloq, Kab. Kutai Kartanegara	Long Beleh Haloq	-
6	1336025	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Tidak adanya gedung Posyandu di Desa Long Haloq, sehingga ketika ada kegiatan posyandu selalu dilakukan di gedung Kantor(BPU) Kantor Desa	Desa Long Beleh Haloq, Kab. Kutai Kartanegara	Long Beleh Haloq	1. Lengkapi Usulan dengan Proposal 2. Lengkapi Dokumentasi (Lokasi yang akan di bangun) 3. Lengkapi Status Lahan tanah (Lokasi Pembangunan Posyandu)
7	1344552	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)	Banyaknya sampah tidak sesuai dengan truk sampah sehingga sampah masih menumpuk dan juga truck sampah yang sering rusak (Prioritas 1, 1 Unit, DLHK)	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
			Rp. 1. 500.000.000,00 (Pengadaan Mobil Angkutan Sampah Truck)			
8	1358406	Pelatihan Mekanik Alat Berat	Kurangnya SDM Masyarakat dan skill untuk bersaing di dunia kerja (Prioritas 1, 1 Paket, DTK) Rp. 200.000.000,00	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	-
9	1358505	Pekerjaan Sederhana tidak menambah Aset (Pembersihan Rumput/semak belukar/gulma,sedimentasi lumpur) Di Kecamatan Kembang Janggut	Kondisi danau yang tertutup rumput dan tidak bisa digunakan untuk wisata (Prioritas 1, 1 Paket, OPD/Aspirasi) Rp. 650.000.000,00 (pembersihan Danau Pulau Layung Seribu)	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	-
10	1358730	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Kembang Janggut	Kondisi jalan yang longsor dan tidak bisa dilewati dan terus longsor dan membesar (Prioritas 1, Dinas PU/Aspirasi) Rp. 2.000.000.000,00 (Penurapan pinggir sungai)	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	-
11	1358967	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Kembang Janggut	Kondisi jalan rusak parah tidak bisa dilewati kendaraan (kendaraan besar lewat jalan kampung, akibatnya jalan kampung menjadi rusak dan membahayakan warga kampung) (Prioritas 1, Dinas PU/Aspirasi) Rp. 5.000.000.000,00 (perbaikan jalan PU Dari arah simpang 4 Log Pound menuju simpang 4 Buaq serta Jalan Arah Desa Kelekat)	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	Tolong dilengkapi dengan proposal dan lokasi jalan disertai titik koordinat
12	1359022	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kec.Kembang Janggut	Akses yang tidak memadai menuju stadion mini (Prioritas 1, 1 Paket, Dinas PU/Aspirasi) Rp. 1.000.000.000 (Pembuatan jalan mnuju stadion mini)	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	Lengkapi Dokumen proposal/surat permohonan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
13	1359069	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Kembang Janggut	Kondisi jalan yang longsor dan amblas sehingga jalan susah dilewati (Prioritas 1, Dinas PU/Aspirasi) Rp. 1.000.000.000,00 (Penimbunan jalan dan pembangunan Turap tepian Tebor)	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	Lengkapi Dokumen proposal/surat permohonan
14	1359137	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kembang Janggut	Banyak jalan desa yang rusak dikarenakan banyaknya kendaraan besar atau bertonase besar yang melintas (Prioritas 1, Dinas Pu/Aspirasi) Rp. 1.000.000.000,00 (Peningkatan jalan desa)	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	Lengkapi Dokumen proposal/surat permohonan
15	1359179	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Kembang Janggut	Kondisi Jalan Longsor dan amblas sehingga jalan susah dilewati (Prioritas 1, Dinas PU/Aspirasi) Rp. 250.000.000,00 (Pembangunan Turap dan pengukuran jalan)	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	Lengkapi Dokumen proposal/surat permohonan
16	1359369	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kembang Janggut	Kondisi jalan yang rusak parah, berlumpur dan berlubang susah untuk dilewati warga desa Kembang Janggut yang bermukim di Berkat Main dan Berkat Sub (Prioritas 1, Dinas PU/Aspirasi) Rp. 4.000.000.000,00 (Peningkatan dan semenisasi Jalan Poros Berkat Main menuju Desa Kembang Janggut)	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	tambahkan proposal usulan dan foto yang disertai koordinat lokasi jalan yang dimaksud
17	1359417	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kembang Janggut	Kondisi jalan yang rusak dan berlumpur dan tidak bisa dilewati kendaraan umum (Prioritas 1, Dinas PU/Aspirasi) Rp. 1.750.000.000,00 (Peningkatan dan semenisasi Jalan Poros Buaq menuju Desa Kembang Janggut)	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	lengkapi dokumen dan bukti dukung.

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
18	1359543	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kembang Janggut	Kondisi yang rusak dan masih tanah jalan penghubung dari jalan desa menuju jalan provinsi (Prioritas 1, Dinas PU/Aspirasi) Rp. 1.000.000.000,00 (Pengurukan badan jalan penghubung antara jalan desa menuju jalan Provinsi)	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	lengkapi dokumen dan bukti dukung.
19	1359584	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kembang Janggut	Kondisi jalan yang rusak dan berlubang serta masih batu (Prioritas 1, Dinas PU/Aspirasi) Rp. 1.000.000.000,00 (Semenisasi jalan sabarudin)	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	Tolong lengkapi proposal dan titik koordinat jalan yang dimaksud
20	1359641	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kembang Janggut	Kondisi jalan masih mengggunakan sirtu dan sering becek apabila terjadi hujan dantidak bisa dilewati (Prioritas 1, 300m, Dinas PU/Aspirasi) Rp. 500.000.000,00 (Semenisasi Jalan Menuju Kuburan Desa)	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	-
21	1359724	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kembang Janggut	Kondisi jalan yang rusak dan sudah tertutup rumput dan separuh masih menggunakan tanah (Prioritas 1, Dinas PU/Aspirasi) Rp. 800.000.000,00 (Peningkatan Jalan Kantor Camat Baru)	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	-
22	1360739	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Kondisi bangunan sangat lapuk dan tidak layak, posisi kantor sangat sempit dan kumuh berada didalam gang, tidak adanya tempat parkir kendaraan roda 4. Sehingga ada beberapa OPD terkait mengalami kesulitan mencari lokasi Kantor Desa	Desa Hambau, RT. 06, Kab. Kutai Kartanegara	Hambau	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
			kami.			
23	1361541	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Tidak adanya akses jalan menuju ke lahan perkebunan, sehingga seluruh kelompok tani masyarakat mengalami kesulitan dalam pengangangkutan tandan buah segar kelapa sawit pada saat panen,. dengan adanya jalan tersebut nantinya memudahkan masyarakat kelompok tani dalam hal aksesibilitas pengangkutan TBS kelapa sawit, memberikan manfaat bagi masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran, dan kemiskinan di desa, serta memberikan Pendapatan Asli Desa.	Desa Hambau, Kab. Kutai Kartanegara	Hambau	Proposal bukan dari kelompok tani
24	1362427	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Seiring terjadinya Abrasi pada sungai belayan dan banyak rumah warga yang tergeletak, maka dari itu perlu adanya peningkatan jalan gang permukiman, khususnya Gang Durian RT. 11 Desa Hambau, dengan adanya peningkatan jalan tersebut nantinya memberikan akses relokasi bagi warga mendirikan bangunan yang terdampak oleh Abrasi sehingga terciptanya asas keadilan bagi masyarakat dan kesejahteraan dalam hal pengembangan wilayah.	Desa Hambau, RT. 011, Kab. Kutai Kartanegara	Hambau	-
25	1404742	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Kondisi jalan berlumpur, sangat sulit untuk dilewati bagi kelompok tani komoditi kebun	Desa Hambau, RT. 16, Kab. Kutai Kartanegara	Hambau	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
			kelapa sawit.			
26	1404778	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Kondisi jalan berlumpur, perlu dilakukan peningkatan jalan.	Desa Hambau, RT. 001, Kab. Kutai Kartanegara	Hambau	-
27	1404830	Pelatihan Kelompok Tani (Poktan)	Keterbatasan Alat Kelompok Tani untuk membuka lahan baru atau mengelola untuk memperluas lahan pertanian nya(Pengadaan alat berat, 1 unit, OPD / Aspirasi) 600.000.000	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	-
28	1404848	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kembang Janggut	Akses Jalan yang sudah rusak dan tertutup rumput dan masih menggunakan tanah (Pembersihan jalan Pasar Modern Kecamatan, 1 Paket, OPD / Aspirasi) 300.000.000	Desa Kembang Janggut. RT. 012, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	lengkapi dokumen dan bukti dukung.
29	1404871	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Belum memadainya tempat untuk anak muda berkreatifitas dan berolah raga (Pembangunan Stadion Mini, 1 Paket, OPD/ Aspirasi) 4.000.000.000	Desa Kembang Janggut, RT. 012, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	-
30	1404911	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Kembang Janggut	Jalan Gang Sudah Di Timbun Ketika Hujan Jalan Menjadi Becek Dan Tidak Bisa Dilalui	jl. Gang Bambu Rt.01 , Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Layang	-
31	1404928	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Kondisi Halaman rusak dan becek karena masih menggunakan Sirtu (Pengadaan Paving Blok Untuk Halaman Mesjid (1 Paket, OPD Aspirasi) Prioritas 1	Desa Kembang Janggut, RT. 006, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	-
32	1404934	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Kembang Janggut	Jalan Sudah DiTimbun Ketika Hujan Jalan Menjadi Becek Dan Sulit Dilewati	Jl.Gang Rempai Rt.01, Kab. Kutai Kartaneg	Bukit Layang	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
				ara		
33	1404955	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Tidak Ada Sekretariat Untuk Pengurus Masjid (Pembangunan Sekretariat Masjid Besar AL-ILHAM Kembang Janggut) (Prioritas 1, 1 Unit, OPD/Aspirasi)	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	-
34	1404959	Pembangunan Pos Keamanan di Kecamatan Kembang Janggut	Pembuatan Poslinmas Disimpang 4 Jalan Menuju Ke JV, Petak 09	Jln.Poros PU RT.01, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Layang	-
35	1404988	Pembangunan Pos Keamanan di Kecamatan Kembang Janggut	Karena untuk memasuki area wisata harus di sediakan pos keamanan	Jln. Poros PU RT. 02, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Layang	-
36	1404989	Pemeliharaan Penerangan Bangunan di Kecamatan Kembang Janggut	Banyak jalan yang belum ada Penerangan Jalan (Pengadaan lampu penerangan jalan di desa) (200 titik, OPD/Aspirasi)	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	lengkapi dokumen dan bukti dukung.
37	1405050	Pelatihan Pemuda untuk Berwirausaha (Wirausaha Perseorangan untuk Pemula)	Kurangnya SDM Masyarakat dan skill untuk bersaing di dunia kerja (Pelatihan untuk kelompok perempuan) (Prioritas 1, 1 Paket, Dinas Tenaga Kerjaan)	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	-
38	1405071	Pelatihan Pemuda untuk Berwirausaha (Wirausaha Perseorangan untuk Pemula)	Kurangnya SDM Masyarakat dan skill untuk bersaing di dunia kerja (Pelatihan Service Elektronik) (Prioritas 1, 1 Paket, Dinas Tenaga Kerjaan)	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	-
39	1405075	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Kembang Janggut	Belum adanya batas pagar untuk lokasi TPU	Jln. PETAK 9 Lokasi Kuburan RT. 04 Desa Bukit Layang, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Layang	-
40	1405088	Pelatihan Pemuda untuk Berwirausaha (Wirausaha Perseorangan untuk Pemula)	Kurangnya SDM Masyarakat dan skill untuk bersaing di dunia kerja (Pelatihan Alat Berat dan arsitektur bangunan serta	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
			pemetaan) (Prioritas 1, 1 Paket, Dinas Tenaga Kerjaan)			
41	1405096	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kembang Janggut	Untuk turun dan naik di pulau wisata belum adanya jembatan/ susuran	Jln. Poros PU RT. 02 , Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Layang	-
42	1405126	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kembang Janggut	Jembatan yang ada bisa di lewati namun sering berisik karena jembatan terbuat dari kayu	Kembang Janggut (Mes Siswa), Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Layang	-
43	1405255	Rehabilitasi Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Kayu dinding lantai sudah rapuh	Jln. Mudos RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Layang	-
44	1405280	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kembang Janggut	tTidak adanya jalan penghubung dari jalan desa menuju jalan Provinsi (Jembatan Penghubung antara jalan desa menuju jalan Provinsi) (Prioritas 1, Dinas PU)	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	lengkapi dokumen dan bukti dukung.
45	1405286	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kembang Janggut	Jembatan yang ada jika hujan dan banjir menjadi berlubang dan kadang tidak bisa di lewati	Jln. Petak 9 RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Layang	-
46	1405371	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Kembang Janggut	Maraknya Kendaraan Truck Pengangkut CPO yang melintas secara beriringan, menyebabkan padatnya jumlah kendaraan yang melintas dijalan, sehingga memungkinkan rawannya terjadinya kecelakaan dan kemacetan. Maka dari itu perlu adanya tindaklanjut lanjutan pembangunan badan jalan ke tiga serta pengerasan. Dengan adanya jalan tersebut, nantinya dapat mengurangi tingkat kecelakaan dan kemacetan.	Desa Hambau, Kab. Kutai Kartanegara	Hambau	-
47	1405376	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Gedung Pusban yang lama sudah tidak layak pakai	Jln. Mudos RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Layang	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
48	1405438	Pengembangan Sawit Rakyat (Pengadaan Bibit Sawit/Ha)	Tidak adanya bibit pada kelompok tani	Desa Hambau, Kab. Kutai Kartanegara	Hambau	-
49	1405455	Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir	Kondisi sungai yang sudah dangkal dan tertutup rumput menyebabkan terhambatnya aliran air (Normalisasi sungai luhung dan sungai Pelele) (Prioritas 1, OPD/Aspirasi)	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	data yang di upload belum memenuhi syarat usulan, lengkapi dengan Surat Permohonan/Profosal
50	1405612	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pengadaan Pupuk Sawit/Ha)	Tidak tersedianya Bibit Kelapa Sawit	Desa Hambau, Kab. Kutai Kartanegara	Hambau	-
51	1405682	Pengembangan Sawit Rakyat (Pengadaan Bibit Sawit/Ha)	Tidak tersedianya bibit kelapa sawit bagi kelompok tani	Desa Hambau, Kab. Kutai Kartanegara	Hambau	-
52	1405750	Peningkatan Jaringan Irigasi dibawah 1000 Ha	Tergenangnya Lahan warga akibatnya warga tidak bisa berkebun dan bertani (Pembuatan irigasi saluran pembuangan air ke sungai lotar) Dinas PU	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	usulan tidak dilengkapi dokumen pendukung
53	1405907	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Jauhnya akses menujunrumah sakit yang berada di Kota Bangun (Pembangunan Rumah Sakit Di Kecamatan Kembang Janggut), Dinas PU/ Aspirasi, Prioritas 1 (titik Koordinat 50N 426534 50N 13081)	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	usulan tidak dilengkapi dokumen pendukung
54	1405987	Pengembangan Sawit Rakyat (Pengadaan Bibit Sawit/Ha)	KT. Tani Karya Abadi memiliki lahan, namun kemampuan terbatas, mohon pengadaan bibit, pupuk dan Herbisida (Dinas Perkebunan) Prioritas 1	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	-
55	1406030	Pengembangan Sawit Rakyat (Pengadaan Bibit Sawit/Ha)	KT. Tunas Baru memiliki lahan, namun kemampuan terbatas, mohon untuk pengadaan Bibit siap tanam dan Pupuk (dinas Perkebunan) Prioritas 1	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	-
56	1406067	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pengadaan Pupuk Sawit/Ha)	KT. Bina Tani Karya memerlukan Bantuan alat panen sawit (Pengadaan Alat Panen sawit)	desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
			Dinas Perkebunan, Prioritas 1			
57	1406928	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Kembang Janggut	Kurangnya bahan (lanjutan pembangunan sekretariat lamin adat 10%)	Jl. Mudos Rt 01 Bukit Layang, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Layang	-
58	1407207	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kembang Janggut	Ketika hujan jembatan bolong dan masyarakat susah melewati jembatan	Jl Petak 9 Rt 01 Bukit Layang, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Layang	-
59	1410978	Fasilitasi Organisasi keolahragaan	Desa Long Beleh haloq, tidak memilik gedung olah raga, sementara anak-mudanya senang beraktifitas olahraga	Desa Long Beleh haloq, Kab. Kutai Kartanegara	Long Beleh Haloq	-
60	1417036	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Belum tersediaanya pagar pembatas dengan jalan Poros Kabupaten	Loa Sakoh, RT.002, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Sakoh	Lengkapi data pendukung : proposal/surat permohonan/volume/dimensi (PxL) pekerjaan, titik koordinat dan dokumentasi (foto lokasi).
61	1417037	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Kondisi bangunan sangat usang dan lapuk, posisi kantor sangat sempit dan sangat kumuh berada didalam gang. Tidak adanya tempat parkir kendaraan, sehingga ada beberapa OPD terkait mengalami kesulitan mencari Kantor Desa kami. Adanya peraturan yang mengikat tentang penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sehingga sangat tidak memungkinkan bagi kami untuk menganggarkan pembangunan Kantor Desa kami yang baru.	Desa Hambau, RT.006, Kab. Kutai Kartanegara	Hambau	-
62	1417132	Rehabilitasi Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Kondisi bangunan sangat lapuk dan usang.	Desa Hambau RT. 011, Kab. Kutai Kartanegara	Hambau	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
63	1417185	Event Olahraga Tradisional dan Rekreasi	Belum adanya sapras penunjag untu kegiatan pemuda dan Olahraga	Loa Sakoh,RT.004, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Sakoh	-
64	1417432	Pengadaan bibit Ternak Kerbau	Belum Terdapat jenis Sapi limonusin, Angsa, Simental, Bahman Cross atau Sapi ras Bali.	Loa Sakoh, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Sakoh	-
65	1417734	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	ada beberapa titik jalan poros PU yang sudah rusak dan perlu segera diperbaiki, ini adalah titik pertama sebelum memasuki desa genting tanah	Desa genting tanah RT 001 jalan poros PU menuju kecamatan kembang janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Genting Tanah	-
66	1417791	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	titik ke 2 jalan poros pu tabang desa genting tanah yang sudah rusak dan perlu diperbaiki	desa genting tanah RT 003 jalan poros tabang, Kab. Kutai Kartanegara	Genting Tanah	-
67	1417861	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	titik ke 3 gorong-gorong jalan poros Pu tabang, jalan sudah berlubang	desa genting tanah RT 013, Kab. Kutai Kartanegara	Genting Tanah	-
68	1418350	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	memiliki lahan namun kemampuan terbatas untuk pengadaan bibit sawit,pupuk dan herbisida	genting tanah seberang, Kab. Kutai Kartanegara	Genting Tanah	-
69	1418415	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	memiliki lahan namun kemampuan terbatas untuk pengadaan bibit sawit,pupuk dan herbisida	genting tanah seberang rapak bengkal, Kab. Kutai Kartanegara	Genting Tanah	-
70	1418466	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	memiliki lahan namun kemampuan terbatas untuk pengadaan bibit sawit,pupuk dan herbisida	genting tanah seberang biait, Kab. Kutai Kartanegara	Genting Tanah	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
71	1418500	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	memiliki lahan namun kemampuan terbatas untuk pengadaan bibit sawit,pupuk dan herbisida	genting tanah jalan danau panjang menuju PT TPS loa sakoh, Kab. Kutai Kartanegara	Genting Tanah	-
72	1418515	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	memiliki lahan namun kemampuan terbatas untuk pengadaan bibit sawit,pupuk dan herbisida	genting tanah danau biuku jalan menuju PT TPS loa sakoh, Kab. Kutai Kartanegara	Genting Tanah	-
73	1418535	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	memiliki lahan namun kemampuan terbatas untuk pengadaan bibit sawit,pupuk dan herbisida	genting tanah ilir selondong jalan poros tabang, Kab. Kutai Kartanegara	Genting Tanah	-
74	1418567	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	memiliki lahan namun kemampuan terbatas untuk pengadaan bibit sawit,pupuk dan herbisida	pejomo genting tanah ulu dalam, Kab. Kutai Kartanegara	Genting Tanah	-
75	1418602	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	memiliki lahan namun kemampuan terbatas untuk pengadaan bibit sawit,pupuk dan herbisida	lokasi lahan genting tanah ilir, Kab. Kutai Kartanegara	Genting Tanah	-
76	1418703	Fasilitasi Organisasi keolahragaan	Desa Long Beleh Haloq, Tidak memiliki Gedung Olah Raga, sementara anak mudanya senang beraktifitas olahraga, selain itu Gedung olahraga juga bermanfaat buat kesehatan, bermain futsal, volly dan permainan lainnya juga bisa menjadi tempat bermusyawarah masayarakat Desa	Desa Long Beleh Haloq, RT 03, Kab. Kutai Kartanegara	Long Beleh Haloq	-
77	1418728	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Tidak adanya Gedung Posyandu di Desa Long Beleh Haloq, Sehingga ketika ada kegiatan posyandu selalu dilakukan di samping Kantor Desa dan juga terkadang di	Desa Long Beleh Haloq, Kab. Kutai Kartanegara	Long Beleh Haloq	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
			kantor BPD			
78	1418756	Event Olahraga Wisata, Tantangan dan Pertualangan	Terdapat Pulau/Rawa di desa Long Beleh Haloq, yang berpotensi dijadikan tempat wisata yang perlu di normalisasikan karena tempat/pulau tersebut belum tertata Rapi	Desa Long Beleh Haloq, RT 01, Kab. Kutai Kartanegara	Long Beleh Haloq	-
79	1418773	Event Olahraga Wisata, Tantangan dan Pertualangan	Tidak adanya tempat wisata atau wahana bermain keluarga	Desa Long Beleh Haloq, RT 01, Kab. Kutai Kartanegara	Long Beleh Haloq	-
80	1418789	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	lahan sudah tersedia, lanjutan pembangunan mesjid baru genting tanah sejak tahun 2008, pembangunan baru pondasi saja	jalan poros tabang desa genting tanah RT 13, Kab. Kutai Kartanegara	Genting Tanah	-
81	1418826	Penyediaan Kapal/Perahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT	Tidak adanya Mesin Ces (ketinting) Buat Nelayan untuk mencari ikan	Desa Long Beleh Haloq, Kab. Kutai Kartanegara	Long Beleh Haloq	-
82	1418841	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	karena terkendala jarak yang jauh menuju rumah sakit kota bangun dan puskesmas kecamatan, maka dibutuhkan pusban baru layanan 24 jam	genting tanah RT 008 jalan poros tabang, Kab. Kutai Kartanegara	Genting Tanah	-
83	1418863	Penyediaan Kapal/Perahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT	Kurangnya alat nelayan untuk mencari ikan seperti (Perahu dan Pukat/Jaring)	Desa Long Beleh Haloq, Kab. Kutai Kartanegara	Long Beleh Haloq	-
84	1418998	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Jalan yang ada saat ini sudah sangat rusak, sehingga diperlukan semenisasi jalan desa (L.5 m x P.2000 m)	Desa Kelekat RT.001 s/d RT.008, Kab. Kutai Kartanegara	Kelekat	Lengkapi data pendukung : proposal/surat permohonan, titik koordinat dan dokumentasi (foto lokasi).
85	1419433	Fasilitasi Organisasi keolahragaan	Belum adanya Sapras penunjang untuk kegiatan pemuda dan olahraga	Loa Sakoh, RT.004, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Sakoh	-
86	1419529	Rehabilitasi Puskesmas	Belum Tersedianya Rumah Sakit Dikecamatan Kembang Janggut, sehingga menyebapkan Pasien yang Membutuhank Pertolongan harus di rujuk ke rumah Sakit	Kecamatan Kembang janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Sakoh	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
			terdekan. yang memakan waktu 3-4 jam perjalanan			
87	1419546	Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan digital	belum tersedianya buka bacaan untuk anak sekolah dan masyarakat sehingga perlu pengadaan buku Bacaan	Loa Sakoh, rt.004, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Sakoh	-
88	1419578	Pengadaan Bibit/Tanaman untuk pemulihan lahan jenis Fast Growing (Tanaman yang cepat tumbuh(tanaman buah-buahan, tumbuhan Sengon, pinus, eucalyptus, Acasia crassicarpa, pulai, Alaban, sungkai, ketapang, lamtoro, trembesi, kaliandra)	sering terjadinya Abrasi dan tanah longsordibantaran sungai sehingga perlu penanaman pohon	Loa Sakoh, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Sakoh	-
89	1419592	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Mesin Pompa, Selang, Nozle, Conection, baju tahan panas, sepatu, helm) (Karhutla)	Kurang Lengkap fasilitas pemadam kebakaran sehingga perlu pengadaan alat pemadam lengkap	Loa Sakoh, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Sakoh	-
90	1419678	Pengadaan bibit Ternak Kerbau	Belim terdapat jenis Sapi Ras Limousin, angus, Simental, Brahma Croos atau Sapu Ras Bali	Loa Sakoh, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Sakoh	-
91	1419695	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	sering Terjadi Genangan air yang diakibatkan kurangnya Drainase Di Area Pemukiman	Loa Sakoh, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Sakoh	Lengkapi data pendukung : proposal/surat permohonan, titik koordinat dan dokumentasi (foto lokasi).
92	1419717	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Belum Tersedianya Balai Desa sehingga Sehingga Pertemuan Rapat dan lainya hanya menggunakan gedung Olahraga	Loa Sakoh, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Sakoh	-
93	1419759	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pengadaan Pupuk Sawit/Ha)	belum tersedianya jalan yang layak untuk para petani	Loa Sakoh, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Sakoh	-
94	1419781	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pengadaan Pupuk Sawit/Ha)	Sebagian Besar Kebun Masyarakat Harus Di Replnting	Loa Sakoh, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Sakoh	-
95	1419805	Pengembangan Sawit Rakyat (Pengadaan Bibit Sawit/Ha)	Sebagian Besar Kebun Masyarakat Harus di Replanting	Loa Sakoh, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Sakoh	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
96	1419815	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pengadaan Pupuk Sawit/Ha)	belum tersedianya varian pupuk yang dibutuhkan para petani	Loa Sakoh, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Sakoh	1. Usulan belum dilengkapi (Proposal dan Dokumentasi) 2. Lokasi usulan masuk lokus prioritas dalam kamus usulan 3 Usulana sama degnan usulan sebelumnya
97	1419932	Pembangunan Ruang Kelas/Guru PAUD	Bemum Tersedianaya Runag Guru PAUD sehinga Perlu pembangunan	Loa Sakoh RT.003, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Sakoh	-
98	1419944	Penyediaan perlengkapan Jalan (LPJU)	Belum menyeluruhnya Lampu Penerang Jalan Umum (LPJU) Sehingga Perlu Pengadaan LPJU	Loa Sakoh, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Sakoh	data yang di upload belum memenuhi syarat usulan, lengkapi dengan Surat Permohonan/Profosal
99	1419981	Pelatihan Operator Alat Berat (Dozer, Loader, DT, HD dan Eksavator)	banyaknya Pemuda Lulus Sekolah yang Perlu Dilatih untuk Prsiapan Sebagai Tenaga Kerja yang terlatih	Loa Sakoh, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Sakoh	-
100	1419998	Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam PAUD	kurang memadainya Alat permaina edukasi Luar PAUD	Loa Sakoh, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Sakoh	-
101	1420468	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Belum tersedianya jalan yang memadai sehingga perlunya Peningkatan Badan Jalan Baru (L.7 m x P.930 m)	Desa Kelekat RT.002 s/d RT.008, Kab. Kutai Kartanegara	Kelekat	Lengkapi data pendukung : proposal/surat permohonan, titik koordinat dan dokumentasi (foto lokasi).
102	1420476	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan pengumpan lokal	Belum tersedianya pelabuhan penyeberangan kendaraan yang memadai, sehingga diperlukan Pembangunan Pelabuhan Feri Kelekat - Damai Estate	Desa Kelekat RT.001, Kab. Kutai Kartanegara	Kelekat	usulan tidak dilengkapi dokumen pendukung
103	1420481	Rehabilitasi Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Rehab Atap dan Plafon Kantor Kepala Desa dan Kantor BPD (480 M2)	Desa Kelekat RT.001, Kab. Kutai Kartanegara	Kelekat	usulan tidak dilengkapi dokumen pendukung
104	1420484	Rehabilitasi Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Lanjutan Plafon Gedung Olahraga	Desa Kelekat RT.007, Kab. Kutai Kartanegara	Kelekat	usulan tidak dilengkapi dokumen pendukung

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
105	1420486	Penyediaan perlengkapan Jalan (LPJU)	Lampu Penerangan Jalan Desa	Desa Kelekat, Kab. Kutai Kartanegara	Kelekat	usulan tidak dilengkapi dokumen pendukung
106	1420492	Pengadaan Bibit/Tanaman untuk pemulihan lahan jenis Fast Growing (Tanaman yang cepat tumbuh(tanaman buah-buahan, tumbuhan Sengon, pinus, eucalyptus, Acasia crassicarpa, pulai, Alaban, sungkai, ketapang, lamtoro, trembesi, kaliandra)	Pengadaan Bibit Buah-Buahan, Durian, Rambutan, Langsat, dll (1000 Pokok)	Desa Kelekat, Kab. Kutai Kartanegara	Kelekat	-
107	1421663	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	pengembangan sawit rakyat, memiliki lahan permohonan pengadaan bibit sawit kelompok tani benaya mandiri	genting tanah ilir, kelompok tani benaya mandiri, Kab. Kutai Kartanegara	Genting Tanah	-
108	1421685	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	pengembangan sawit rakyat, memiliki lahan permohonan pengadaan bibit sawit kelompok tani sumber jaya	genting tanah ilir kelompok tani sumber jaya, Kab. Kutai Kartanegara	Genting Tanah	-
109	1421698	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	pengembangan sawit rakyat, memiliki lahan permohonan pengadaan alat memanen sawit kelompok tani nangka jawa indah	genting tanah ilir, Kab. Kutai Kartanegara	Genting Tanah	-
110	1421762	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	pembuatan jalan sebagai jalur alternatif tani yang belum bisa diakses dari jalan pejomo menuju segedur untuk dijadikan jalan tani dan jalan desa	genting tanah ulu menuju jalan, Kab. Kutai Kartanegara	Genting Tanah	-
111	1421783	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	jalan perjuangan RT 01-04 sering dilalui banjir musimam sehingga menyebabkan erosi pada jalan, maka dari itu perlu dilakukan pengurukan dan pengerasan jalan dan juga pembuatan saluran drainase untuk saluran air	genting tanah RT 001-RT 004, Kab. Kutai Kartanegara	Genting Tanah	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
112	1421786	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	relokasi rumah warga genting tanah RT 001-RT 004 yang terkena dampak longsor yang berada dibantaran sungai belayan	genting tanah RT 001-004, Kab. Kutai Kartanegara	Genting Tanah	-
113	1421938	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	kurangnya pengetahuan masyarakat dibidang komputer, driver dan mekanik alat berat	Desa Muai, Kab. Kutai Kartanegara	Muai	-
114	1421944	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	masih banyak kurang peralatan di bidang kesehatan untuk posyandu	Desa Muai RT 09, Kab. Kutai Kartanegara	Muai	1. Permasalahan dan usulan tidak sinkron 2. Usulan belum spesifik 3. Lengkapi usulan dengan proposal 4. lengkapi dokumentasi
115	1421954	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pengadaan Pupuk Sawit/Ha)	banyak petani yang tidak bisa mendapatkan pupuk yang cukup untuk kebun kelapa sawit	Desa Muai, Kab. Kutai Kartanegara	Muai	-
116	1421967	Pengadaan ambulans desa darat dan air	ambulan desa yg sudah sering rusak dan sudah lama, dan jarak yang sangat jauh menuju rumah sakit terdekat, masyarakat sangat membutuhkan ambulan.	Desa Muai, Kab. Kutai Kartanegara	Muai	-
117	1421971	Pengadaan Mesin Pompa	sering rusak mesin pompa air yg ada di desa	Desa Muai, Kab. Kutai Kartanegara	Muai	Lengkapi data pendukung : proposal/surat permohonan, titik koordinat dan dokumentasi (foto lokasi). Lengkapi volume/dimensi (PxLxT) pekerjaan.
118	1421974	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Pick Up)	susah membuang sampah, dikarenakan tidak ada sarana untuk memngangkut sampah	Desa Muai, Kab. Kutai Kartanegara	Muai	-
119	1421981	Pengadaan Mebel PAUD (Pengadaan Meja kursi Guru, Meja kursi Siswa, Lemari rak buku, lemari file,)	banyak sarana dan prasarana yang sudah tidak layak digunakan untuk siswa	Desa Muai, Kab. Kutai Kartanegara	Muai	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
120	1421983	Pengadaan Madu Kelulut (Kelenceng)	semoga bisa menjadi tambahan untuk masyarakat	Desa Muai, Kab. Kutai Kartanegara	Muai	-
121	1421987	Pengadaan Tower Repaeter / Penguat Sinyal	sangat buruknya sinyal di desa muai, membuat pemdes susah membuat laporan via online	Desa Muai , Kab. Kutai Kartanegara	Muai	-
122	1421992	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	sering terjadi genangan air kalau musim hujan	desa muai, Kab. Kutai Kartanegara	Muai	Lengkapi data pendukung : proposal/surat permohonan, titik koordinat dan dokumentasi (foto lokasi). Lengkapi volume/dimensi (PxLxT) pekerjaan.
123	1421995	Penyediaan perlengkapan Jalan (LPJU)	masih kurangnya lpju untuk desa muai dan tiang PLN 30 batang	Desa Muai, Kab. Kutai Kartanegara	Muai	-
124	1421998	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	jalan licin dikerenakan masih tanah	desa muai rt 9, Kab. Kutai Kartanegara	Muai	Lengkapi data pendukung : proposal/surat permohonan, titik koordinat dan dokumentasi (foto lokasi). Lengkapi volume/dimensi (PxLxT) pekerjaan.
125	1422001	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	tergenang air kalau musim hujan	rt 2 desa muai, Kab. Kutai Kartanegara	Muai	Lengkapi data pendukung : proposal/surat permohonan, titik koordinat dan dokumentasi (foto lokasi). Lengkapi volume/dimensi (PxLxT) pekerjaan.
126	1422003	Pengadaan Mebel PAUD (Pengadaan Meja kursi Guru, Meja kursi Siswa, Lemari rak buku, lemari file,)	banyak meja yang rusak	desa muai, Kab. Kutai Kartanegara	Muai	-
127	1422008	Pengembangan Sawit Rakyat (Pengadaan Bibit Sawit/Ha)	banyak petani yang tidak mendapat bibit unggul	desa muai, Kab. Kutai Kartanegara	Muai	-
128	1422011	Pelatihan Tenaga kerja konstruksi	kurangnya daya saing bagi masyarakat yang ingin bekerja	desa muai, Kab. Kutai Kartanegara	Muai	usulan tidak dilengkapi dokumen pendukung

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
129	1422014	Pengadaan Sambungan Rumah (SR)	belum adanya rumah singgah untk tamu desa	desa muai rt 2, Kab. Kutai Kartanegara	Muai	Lengkapi data pendukung : proposal/surat permohonan, titik koordinat dan dokumentasi (foto lokasi). Lengkapi volume/dimensi (PxLxT) pekerjaan.
130	1422022	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	dikarenakan sudah akan runtuh maka perlu untuk dilakukan pemindahan	desa muai Rt 03, Kab. Kutai Kartanegara	Muai	-
131	1422025	Pembangunan Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT)	rumah untuk bidan Desa	desa muai RT 9, Kab. Kutai Kartanegara	Muai	-
132	1422032	Kerjasama Media (Online/Cetak/Radio/Videotron/TV)	perlunya videotron untk informasi untuk masyarakat	kantor Desa Muai, Kab. Kutai Kartanegara	Muai	-
133	1422143	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	jalan masih dalam keadaan tanah biasa, kalau hujan licin dan banyak genangan air	rt 9 desa muai, Kab. Kutai Kartanegara	Muai	Lengkapi data pendukung : proposal/surat permohonan, titik koordinat dan dokumentasi (foto lokasi). Lengkapi volume/dimensi (PxLxT) pekerjaan.
134	1422176	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Kembang Janggut	Sehubungan dengan adanya wacana Pemekaran Desa Kembang Janggut. Kondisi jalan menuju lokasi pembangunan gedung kantor desa baru masih rusak dan berlumpur belum menggunakan sirtu (mohon Peningkatan Badan Jalan Menuju Gedung Kantor Desa Baru) Prioritas 1	Desa Kembang Janggut RT. 012, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	gambaran permasalahan belum jelas
135	1422189	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Sehubungan Dengan Adanya Rencana pemekaran Desa Kembang Janggut, Maka di anggap perlu dibangunnya Gedung Kantor Desa baru untuk menjalankan Administrasi . Prioritas 1 dengan titik Kordinat	Desa Kembang Janggut RT. 012, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	usulan tidak dilengkapi dokumen pendukung

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
			50N 429007 50N 17300			
136	1422196	Pelatihan Akuntasi Koperasi	sangat di butuhkan diadakanya pelatihan untk bisa berkembang lebih baik lagi	desa muai koperasi B.S, Kab. Kutai Kartanegara	Muai	-
137	1422200	Pelatihan Mekanik Alat Berat	perlu diadakan pelatihan untuk pemuda Desa Muai, agar bisa bersaing dalam mencari kerja	Desa Muai, Kab. Kutai Kartanegara	Muai	-
138	1422205	Pelatihan Operator Alat Berat (Dozer, Loader, DT, HD dan Eksavator)	kurangnya pengalaman masyarakat dalam pengoperasian alat berat	Desa Muai, Kab. Kutai Kartanegara	Muai	-
139	1422290	Pembuatan Tempat Sampah Penampungan Sementara di Kecamatan Kembang Janggut	belum adanya tempat sampah di Desa	desa muai , Kab. Kutai Kartanegara	Muai	lengkapi usulan
140	1422319	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Rambu, Marka, ZOSS (Zona Selamat Sekolah) dan Paku Marka)	Perlunya marka jalan atau rambu rabu bagi pengguna kendaraan apa bila melintasi pemukiman warga serta melintasi lokasi sekolah byang membahayakan siswa siswi. Prioritas 1	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	usulan tidak dilengkapi dokumen pendukung
141	1422325	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Kembang Janggut	sering terjadi air meluap kejalan kalau hujan deras	RT 1 dan RT 2 Desa Muai, Kab. Kutai Kartanegara	Muai	lengkapi usulan
142	1422329	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kembang Janggut	kondisi jalan yang tanah, membuat jalan licin saat di guyur hujan	Desa Muai RT 9, Kab. Kutai Kartanegara	Muai	lengkapi usulan
143	1422331	Pemeliharaan Penerangan Bangunan di Kecamatan Kembang Janggut	masih banyak lokasi lingkungan desa yang belum ada penerangan	kantor Desa Muai, Kab. Kutai Kartanegara	Muai	lengkapi usulan
144	1422334	Pekerjaan Sederhana tidak menambah Aset (Pembersihan Rumput/semak belukar/gulma, sedimentasi lumpur) Di Kecamatan Kembang Janggut	jalan yang mengarah ke Cakra Estate Rea Kaltim masih banyak gulma di jalan	jln cakra Desa Muai, Kab. Kutai Kartanegara	Muai	lengkapi usulan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
145	1422384	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Kembang Janggut	Kondisi Jalan masih tanah dan rendah belum bisa dilewati kendaraan	RT. 13 Desa Long Beleh Modang, Kab. Kutai Kartanegara	Long Beleh Modang	-
146	1422441	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Kembang Janggut	Kondisi Jalan masih ttanah dan rendah jalan tani belum bisa dilewati kendaraan	RT. 13 Desa Long Beleh Modang, Kab. Kutai Kartanegara	Long Beleh Modang	lengkapi usulan
147	1422442	Pengadaan Tower Repaeter / Penguat Sinyal	Jaringan Seluler dan Internet Blank Spot	RT. 4 Desa Long Beleh Modang, Kab. Kutai Kartanegara	Long Beleh Modang	-
148	1422452	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Kembang Janggut	Kondisi jalan yang rusak dan berlumpur dan tidak dilewati kendaraan umum	RT. 2, Kab. Kutai Kartanegara	Long Beleh Modang	-
149	1422453	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Kembang Janggut	Kondisi Jalan Yang rusak Berlubang Licin Apabila Hujan	RT. 4, Kab. Kutai Kartanegara	Long Beleh Modang	-
150	1422454	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Kembang Janggut	Kondisi Jalan Yang rusak Berlubang serta Masih Batu	RT. 1 Desa Long Beleh Modang, Kab. Kutai Kartanegara	Long Beleh Modang	-
151	1423283	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Kebutuhan Bibit Sawit unggul untuk masyarakat Desa	Desa Perdana RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara	Perdana	-
152	1423315	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Kebutuhan Bibit Sawit unggul untuk masyarakat Desa	Desa Perdana RT. 02, Kab. Kutai Kartanegara	Perdana	-
153	1423329	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Kebutuhan Bibit Sawit unggul untuk masyarakat Desa	Desa Perdana RT. 03, Kab. Kutai Kartanegara	Perdana	-
154	1423361	Fasilitasi sarana prasarana desa	Pencegahan Bencana Kebakaran	Desa Perdana RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara	Perdana	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
155	1423411	Fasilitasi sarana prasarana desa	Sarana Pemakaman Umum yang semakin sempit	Desa Perdana RT. 03, Kab. Kutai Kartanegara	Perdana	-
156	1423470	Belanja Hibah Lembaga Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	sudah puluhan tahun SMP didesa genting tanah belum dinegerikan, lahan sudah tersedia berada digenting tanah ilir	selondong genting tanah ilir, Kab. Kutai Kartanegara	Genting Tanah	-
157	1423564	Fasilitasi sarana prasarana desa	Pasar Desa yang masih perlu perbaikan dan pembangunan	Desa Perdana RT. 03, Kab. Kutai Kartanegara	Perdana	-
158	1423593	Fasilitasi sarana prasarana desa	Kurangnya Lahan untuk Sarana/Prasarana Fasilitas Umum Desa	Desa Perdana RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara	Perdana	-
159	1423623	Fasilitasi sarana prasarana desa	Kurangnya Lahan Untuk Sarana Peningkatan Perkantoran dan Lainya	Desa Perdana RT. 02, Kab. Kutai Kartanegara	Perdana	-
160	1423645	Fasilitasi sarana prasarana desa	Perlunya Ruang Rapat Kantor Desa yanga luas	Desa Perdana RT. 02, Kab. Kutai Kartanegara	Perdana	-
161	1423697	Fasilitasi sarana prasarana desa	Halaman Kantor Desa sebagian yang belum di semenisasi	Desa Perdana RT. 02, Kab. Kutai Kartanegara	Perdana	-
162	1423710	Fasilitasi sarana prasarana desa	Pembuatan Pagar Kantor Desa	Desa Perdana RT. 02, Kab. Kutai Kartanegara	Perdana	-
163	1423732	Fasilitasi sarana prasarana desa	Pembangunan Gedung Olah Raga	Desa Perdana RT. 02, Kab. Kutai Kartanegara	Perdana	-
164	1423747	Fasilitasi sarana prasarana desa	Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Pembatu	Desa Perdana RT. 02, Kab. Kutai Kartanegara	Perdana	-
165	1423875	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Pengadaan Bibit Sapi	Desa Perdana RT. 1, Kab. Kutai Kartanegara	Perdana	-
166	1423902	Fasilitasi sarana prasarana desa	Peningkatan/Semenisasi Jalan Desa	Desa Perdana RT. 01, Kab. Kutai	Perdana	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
				Kartanegara		
167	1423924	Fasilitasi sarana prasarana desa	Peningkatan/Semenisasi Jalan Gang Desa	Desa Perdana RT. 02, Kab. Kutai Kartanegara	Perdana	-
168	1423952	Fasilitasi sarana prasarana desa	Peningkatan/Semenisasi Jalan Desa (Perdana Ketenuq)	Desa Perdana RT. 03, Kab. Kutai Kartanegara	Perdana	-
169	1423985	Fasilitasi sarana prasarana desa	Lanjutan Semenisasi Jalan Jalan Gang SMK	Desa Perdana RT. 07, Kab. Kutai Kartanegara	Perdana	-
170	1423998	Fasilitasi sarana prasarana desa	Lanjutan Semenisasi Jalan Gang Lingkungan RT 07	Desa Perdana RT. 07, Kab. Kutai Kartanegara	Perdana	-
171	1424021	Fasilitasi sarana prasarana desa	Semenisasi Jalan Gang	Desa Perdana RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara	Perdana	-
172	1424051	Pembangunan Ruang Kelas/Guru PAUD	Kurangnya Ruangan Kelas	Desa Perdana RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara	Perdana	-
173	1424064	Fasilitasi sarana prasarana desa	Kurangnya Jaringan Listrik tegangan rendah	Desa Perdana RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara	Perdana	-
174	1424077	Fasilitasi sarana prasarana desa	serambi masjid AT-TAQWA	Desa Perdana RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara	Perdana	-
175	1424798	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	sudah puluhan tahun pasar desa berada ditengah pemukiman warga dan tepat berada dijalan umum desa, perlu adanya dinas terkait untuk relokasi pasar yang lebih strategis	jalan poros pu tabang desa genting tanah, Kab. Kutai Kartanegara	Genting Tanah	-
176	1424878	Fasilitasi Organisasi keolahragaan	lahan sudah tersedia namun kemampuan terbatas menambah fasilitas olahraga (lapangan Volly), SMA ki hajar dewantara	SMA ki hajar dewantara desa genting tanah, Kab. Kutai Kartanegara	Genting Tanah	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
177	1424898	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	lahan parkir sekolah yang kurang memadai SMA ki hajar dewantara, perlu adanya semenisasi	SMA ki hajar dewantara desa genting tanah, Kab. Kutai Kartanegara	Genting Tanah	-
178	1424956	Event Olahraga Wisata, Tantangan dan Pertualangan	potensi hutan gambut milik desa bisa menjadi daya tarik wisata	genting tanah ilir, Kab. Kutai Kartanegara	Genting Tanah	-
179	1425338	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	jalan rusak poros pu desa genting tanah titik 7	desa genting tanah jalan poros pu tabang titik 7, Kab. Kutai Kartanegara	Genting Tanah	-
180	1425352	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	jalan rusak poros pu tabang titik 8	desa genting tanah jalan poros pu tabang , Kab. Kutai Kartanegara	Genting Tanah	-
181	1428266	Pengembangan Sawit Rakyat (Pengadaan Bibit Sawit/Ha)	Pengadaan Bibit Kepala Sawit sebanyak 7000 pokok untuk mendukung potensi yang ada di desa	Desa Kelekat, Kab. Kutai Kartanegara	Kelekat	-
182	1428320	Penyediaan Mesin Kapal/Perahu Penangkap Ikan 0 - 5 GT	an Perahu dan Ces Kelompok Nelayan (20 Orang)	ekat, Kab. Kutai Kartanegara	Kelekat	-
183	1428349	sarana prasarana desa	unan Gapura Desa	ekat RT.001, Kab. Kutai Kartanegara	Kelekat	-
184	1428380	sarana prasarana desa	an Pagar Lokasi Pamsimas	ekat RT.004, Kab. Kutai Kartanegara	Kelekat	-
185	1428392	sarana prasarana desa	unan Rumah Singgah Pekuburan	ekat, Kab. Kutai Kartanegara	Kelekat	-
186	1428421	sarana prasarana desa	rama Pelajar Kelekat di Kembang Janggut/Rumah Singgah	nbang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kelekat	-
187	1428443	n, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	unan Lapangan Volly Ball	ekat RT.007, Kab. Kutai Kartanegara	Kelekat	-
188	1428464	sarana prasarana desa	Pembangunan Lamin Adat, Pembuatan Ukiran Adat dan Pemeliharaan	ekat RT.004, Kab. Kutai Kartanegara	Kelekat	-
189	1428493	sarana prasarana desa	unan Gedung SMP (Lokal 4 x L.10 x	ekat, Kab. Kutai	Kelekat	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
			P.12)	Kartanegara		
190	1428776	sarana prasarana desa	unan Pasar Desa (L.10 m x P.80 m)	kat RT.004, Kab. Kutai Kartanegara	Kelekat	-
191	1428794	sarana prasarana desa	unan Rumah Tempat Tinggal Tenaga Kesehatan (L.8 m x P.12 m)	kat, Kab. Kutai Kartanegara	Kelekat	-
192	1428818	sarana prasarana desa	unan Baru Gedung SDN 006 Kembang Janggut	kat RT.002, Kab. Kutai Kartanegara	Kelekat	-
193	1428991	sarana prasarana desa	unan Jalan Kelompok Tani Bukit Jeng	kat, Kab. Kutai Kartanegara	Kelekat	-
194	1429098	angan Sawit Rakyat (Pengadaan Bibit Sawit/Ha)	sedianya bibit unggul komoditas kelapa sawit bagi kelompok tani.	nbau, RT.009, Kab. Kutai Kartanegara	Hambau	-
195	1430429	sarana prasarana desa	Pembangunan Gedung Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Jemaat Kelekat	kat RT.001, Kab. Kutai Kartanegara	Kelekat	-
196	1430457	sarana prasarana desa	unan Masjid Desa Kelekat	kat RT.008, Kab. Kutai Kartanegara	Kelekat	-
197	1430532	sarana prasarana desa	unan Pastory/Rumah Hamba Tuhan GPDI (L.6 m x P.12 m)	kat RT.004, Kab. Kutai Kartanegara	Kelekat	-
198	1430553	sarana prasarana desa	Jaringan PLN	kat RT.001 sd RT.008, Kab. Kutai Kartanegara	Kelekat	-
199	1578472	n bibit Ternak Kambing	rsediannya bibit kambing	au Pinang, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
200	1578709	sarana prasarana desa	rsedianya sarana prasarana BPD	au Pinang, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
201	1578818	angan Sawit Rakyat (Pengadaan Bibit Sawit/Ha)	rsedianya Bibit Sawit Unggul	au Pinang, RT,05, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
202	1579100	n bibit Ternak Kambing	rsedianya Bibit Kambing	au Pinang, RT.04, Kab. Kutai	Pulau Pinang	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
				Kartanegara		
203	1579391	rat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	uk pembangunan Gereja GKII Pulau Pinang tidak mencukupi	au Pinang, RT.01, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
204	1579591	libah Lembaga Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	rsedianya Tenda / Sarana Prasarana RT, 10	au Pinang, RT.10, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
205	1579907	libah Lembaga Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	rsedianya Tenda di RT.09	au Pinang, RT.09, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
206	1580034	rat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	g dibutuhkan untuk Pembangunan Pastori Gereja GKII Pulau Pinang tidak mencukupi	au Pinang, RT.01, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
207	1580213	unan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Kembang Janggut	afon SD 003	sa bukit layang, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Layang	-
208	1580291	n Tower Repaeter / Penguat Sinyal	tan jaringan internet	s RT.01 Desa Bukit Layang, Kab. Kutai Kartanegara	Bukit Layang	-
209	1580506	an Alat Penunjang / Peraga (BKB Kit, BKB HI, BKL Kit, BKB Kit Stunting, BKR Kit, Kit Siap Nikah Anti Stunting)	rsedianya Sarana Prasarana POSYANDU Desa Pulau Pinang	au Pinang, RT.07, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
210	1580549	an Alat Kesenian	rsedianya Sarana Prasarana Gereja GPDI Desa Pulau Pinang	au Pinang, RT.05, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
211	1584805	libah Lembaga Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	rsedianya Sarana Prasarana Lembaga Adat Desa Pulau Pinang	au Pinang, RT.07, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
212	1584914	libah Lembaga Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	rsedianya Sarana Prasarana PKK Desa Pulau Pinang	au Pinang, RT.07, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
213	1585116	an Benih Ikan / Udang	antuan dana untuk kelompok budidaya ikan	au Pinang, RT.07, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
214	1586098	sarana prasarana desa	va Arus Listrik Di Desa Long Beleh Haloq, Menyebabkan beberapa rumah warga tidak memiliki Bisa meuliki Listrik di rumah mereka.	g Beleh Haloq, Kab. Kutai Kartanegara	Long Beleh Haloq	-
215	1586114	sarana prasarana desa	anya TPA (tempat pembuangan akhir) sampah, di Desa Long Beleh Haloq menyebabkan lingkungan daerah Desa menjadi Kumuh.	g Beleh Haloq, Kab. Kutai Kartanegara	Long Beleh Haloq	-
216	1586130	unan/Penyediaan Sarana dan Prasarana Dermaga Sungai dan Danau	g Beleh Haloq, tidak memiliki Dermaga penyeberangan, sehingga selalu menumpang dermaga Perusahaan yang belum memenuhi standar keselamatan.	g Beleh Haloq, Kab. Kutai Kartanegara	Long Beleh Haloq	-
217	1586246	sarana prasarana desa	anya tempat penampungan air (Tandon air) di beberapa Rumah warga	g Beleh Haloq, Kab. Kutai Kartanegara	Long Beleh Haloq	-
218	1586298	pembangunan gedung Posyandu	anya Gedung Posyandu, menyebabkan setiap kali ada kegiatan posyandu selalu menumpang Balai Desa.	g Beleh Haloq, Kab. Kutai Kartanegara	Long Beleh Haloq	-
219	1586703	sarana prasarana desa	g Beleh Haloq belum memiliki Jembatan Penyeberangan Desa yang mengubungan ases jalan Desa Ke Jalan PU diseberang sungai	g Beleh Haloq, Kab. Kutai Kartanegara	Long Beleh Haloq	-
220	1587552	pembangunan gedung Posyandu	rsedianya Gedung Posyandu yang memadai dan Sarana Prasarana Posyandu	au Pinang, RT.07, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
221	1587610	arang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	rsedianya Sarana Prasarana Sangar Tari " PINANG NGELAWAI"	au Pinang, RT.01, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
222	1587719	unan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Kembang Janggut	rsedianya gorong-gorong kantor BPD Desa Pulau Pinang	au Pinang, RT.07, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
223	1587773	n Alat Pemadam Kebakaran (Mesin Pompa, Selang, Nozle, Conection, baju tahan panas, sepatu, helm) (Karhutla)	rsedianya Alat Pemadam Kebakaran Desa Pulau Pinang, RT.05	au Pinang, RT.05 , Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
224	1587781	angan Sawit Rakyat (Pengadaan Bibit Sawit/Ha)	rsedianya Bibit Sawit Unggul	au Pinang, RT.05, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
225	1587786	libah Lembaga Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	rsedianya Sarana Prasarana RT.03 Desa Pulau Pinang, Kecamatan Kembang Janggut	au Pinang, RT.03, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
226	1587795	libah Lembaga Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	rsedianya Tenda & Sarana Prasarana RT. 05 Desa Pulau Pinang	au Pinang, RT.05, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
227	1587805	tan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kembang Janggut	alan yang sering rusak, ketika hujan/banjir besar maka perlu sekali peningkatan badan jalan Desa Pulau Pinang, RT.05	au Pinang, RT.05, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
228	1587811	sarana prasarana desa	rsedianya Sarana Prasarana Desa Yaitu Layar Interactive	au Pinang, RT.07, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
229	1587880	n Madu Kelulut (Kelenceng)	a pendapata warga desa, dan semoga dengan adanya bantuan budidaya kelulut bisa menjadi tambahan untuk masyarakat	i, Kab. Kutai Kartanegara	Muai	-
230	1587898	libah Lembaga Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	rsedianya Bangunan Pasar Desa yang layak	au Pinang, RT. 07, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
231	1587939	unan Sarana dan Prasarana MCK dan Tangki Septik	rsedianya MCK rumah warga, yang berada di bantaran sungai belayan Desa Pulau Pinang, RT.01 sampai dengan RT. 06	au Pinang, RT. 01 sampai dengan RT. 06, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
232	1588020	unan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Kembang Janggut	rsedianya Lamin Adat Dayak Tunjung Desa Pulau Pinang	au Pinang, RT. 01 Samping Gereja GKII, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
233	1588060	unan TPS3R dan sarana pendukungnya	rsedianya terminal untuk calon penumpang, tempat Parkir Damri	au Pinang, RT,07, Kab. Kutai	Pulau Pinang	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
			serta tempat pemondokan sopir.	Kartanegara		
234	1588075	jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	sa belum adanya semenisasi sehingga jalan berlubang dan berlumpur Desa Pulau Pinang, RT 01 s/d RT 07	au Pinang, RT.07, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
235	1588089	jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	sa belum adanya semenisasi sehingga jalan berlubang dan berlumpur Desa Pulau Pinang RT 01 s/d RT 05, (Jalur 1 Jalan lama Desa Pulau Pinang)	au Pinang, RT. 01 s/d RT. 05, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
236	1588101	jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	a akses jalan sebagai penghubung RT 06 & RT 05 perlunya Semenisasi Jalan Umum Desa RT 06 Desa Pulau Pinang	au Pinang, RT.06, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
237	1588113	unan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	anya gedung untuk kegiatan seremonial seperti Hajatan Pernikahan, maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya. Gedung Serba Guna	au Pinang, RT.07, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
238	1588133	sarana prasarana desa	anya rumah dinas bagi aparatur desa, jarak kerja aparatur desa dengan kantor yang jauh.	au Pinang, RT.07, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
239	1588144	jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	g rusak parah akibat hujan terus menerus sehingga hampir tidak bisa dilewati. Permohonan Semenisasi Jalan Umum Desa RT 01 s/d RT 05 (Jalur 2 Belakang Kampung)	au Pinang, RT.01 s/d RT. 05, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
240	1588188	asi Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	anya gedung yang memadai yang dapat digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan, Permohonan Pembangunan BPU Kantruksi Beton (Uk. L 25 x P. 35 M)	au Pinang, RT.07, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
241	1588207	unan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Kembang Janggut	uhan penduduk semakin pesat sehingga diperlukan perluasan pemukiman dan akses jalan sangat dibutuhkan. Maka Perlu	au Pinang, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
			Pembukaan Jalan Baru dan Pengerasan badan jalan di Belakang Kampung			
242	1588220	n, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	anya sarana yang memadai prasarana olahraga untuk menyalurkan bakat pemuda dan remaja. Seperti Pembangunan Gedung Olahraga Pemuda L 20 x P 30	au Pinang, RT.07, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
243	1588234	n, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	anya tribun tempat duduk untuk penonton di lapangan sepak bola, yang selama ini penontonnya hanya berdiri di pinggir lapangan. Maka Perlu Pembangunan Panggung/Tribun Penonton Lapangan Sepak Bola Desa Pulau Pinang, RT. 03	au Pinang, RT.03, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
244	1588245	rat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	empat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Disamping sebagai tempat beribadah diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaat/jamaahnya, agar kehidupan beragama masyarakat sekitarnya dapat menjadi lebih baik. Maka Perlu Pembangunan Gereja GKII Pulau Pinang (Lanjutan Gerbang Dayaku)	au Pinang, RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
245	1588257	asi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	umah guru yang rusak berat, seperti atap, lantai dan dinding serta fasilitas MCK yang tidak layak. Maka Perlu Rehab Rumah Guru SD 008 Kembang Janggut.	au Pinang, RT. 03, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
246	1588276	unan Ruang Kelas/Guru PAUD	ekolah Dasar 008 Kembang Janggut yang rusak berat, seperti atap, lantai dan dinding serta fasilitas WC yang tidak layak. Maka Perlu	au Pinang, RT.07, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
			Pembangunan Sekolah Dasar 008 Kembang Janggut yang baru			
247	1588295	n sarana dan prasarana perpustakaan digital	anya ruang praktek bagi siswa. Maka Perlu Pembangunan Ruang Laboratorium Sekolah SD 008 Kembang Janggut	au Pinang, RT.07, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
248	1588307	unan gedung perpustakaan desa/Kelurahan	anya ruang perpustakaan yang memadai untuk belajar bagi anak-anak. Maka Perlu Pembangunan Perpustakaan Desa.	au Pinang, RT.07, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
249	1588315	tan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kembang Janggut	nya kegiatan keluar masuk warga antar RT 05 dan RT 06 maka perlu dilakukan pembangunan jembatan Beton	au Pinang. RT. 06, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
250	1588374	sarana prasarana desa	rsedianya Pagar Kantor Desa Pulau Pinang, mengingat luas tanah desa yg cukup besar. maka kami memohon bantuan Pembangunan Pagar.	au Pinang, RT.07, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
251	1590725	sarana prasarana desa	sedianya atap parkiran yang layak untuk kendaraan sehingga menyebabkan semua kendaraan kehujanan dan kepanasan.	h RT.003 JLn.pusban, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Sakoh	-
252	1590738	asi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	aknya ruang kelas dan tidak adanya ruang guru TK PAUD Desa Loa Sakoh	h RT.003 jln.Pusban, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Sakoh	-
253	1590744	libah Lembaga Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	adrasah ibtidayah Sullamul huda genting tanah kelebihan kapasitas murid yang menyebabkan kekurangan ruang kelas belajar	anah RT 008 berada didepan kantor kepala desa, Kab. Kutai Kartanegara	Genting Tanah	-
254	1590748	unan Embung Perkebunan	anya embung sehingga membuat masyarakat susah untuk mendapatkan air	h, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Sakoh	-
255	1590755	jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	an jalan untuk pengembangan lahan perkebunan tebuan Rp.235.000.000	enting tanah RT 012 jalan poros pu tabang, Kab. Kutai	Genting Tanah	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
				Kartanegara		
256	1590768	asi Puskesmas Pembantu	ya masyarakat desa dan tetangga yang berkunjung kepusban. Akan tetapi pusban yang ada didesa kurang layak sehingga diperlukannpembagunan gedung baru.	h, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Sakoh	-
257	1590775	an Tempat Sampah Penampungan Sementara di Kecamatan Kenohan	anya lokasi tempat pembuangan akhir (TPA)	h, Kab. Kutai Kartanegara	Loa Sakoh	-
258	1590793	libah Lembaga Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	a penerangan yang melewati jalan poros pu tabang desa genting tanah dikhawatirkan terjadinya rawan kecelakaan, kasus pencurian dan sebagainya.pengadaan lampu penerangan jalan volume 40 titik	anah jalan poros pu tabang, Kab. Kutai Kartanegara	Genting Tanah	-
259	1590804	sarana prasarana desa	mpir penuhnya kuburan muslimin didesa sehingga harus dibutuhkan adanya pembebasan lokasi kuburan muslimin	h , Kab. Kutai Kartanegara	Loa Sakoh	-
260	1590819	Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	lanya tenaga menjahit yang memadai	au Pinang, RT.07, Kab. Kutai Kartanegara	Pulau Pinang	-
261	1590982	unan Ruang Kelas/Guru PAUD	lemadainya ruangan Ruangan untuk guru, kondisi ruangan yang sempit dan banyaknya barang yang menumpuk, supaya dapat di bangunkan nya ruangan untuk guru SD 001 Kembang Janggut.	mbang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	-
262	1590996	rbuka Non Hijau di perkotaan (Paving, Rabat/Semenisasi)	lalaman sekolah yang masih menggunakan agregat kasar dan sering tergenang air. Mohon semenisasi halaman sekolah SDN 001 Kembang Janggut.	mbang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	CATATAN
263	1591003	unan dan Perbaikan MCK Umum/Komunal Kecamatan Kembang Janggut	/C di Sekolah SDN 001 yang sudah rusak. mohon di bangunkannya WC atau Jamban Untuk SDN 001 Kembang Janggut	nbang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	-
264	1591036	rbuka Non Hijau di perkotaan (Paving, Rabat/Semenisasi)	alam sekolah yang masih byak rawa rawa, mohon pengurukan halaman sekolah SDN 001 Kembang Janggut	nbang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	-
265	1591044	unan Ruang Kelas/Guru PAUD	ekolah yang bersebelahan dengan jalan raya menjadikan anak anak rawa lakalantas. mohon unruk pembangunan Pagar SDN 001 Kembang Janggut	nbang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Kembang Janggut	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2023 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Kembang Janggut Tahun Anggaran 2023 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Kembang Janggut dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut

a. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan

pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

b. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana secara teknokratis prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, dimana kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan : *Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.*

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Kembang Janggut yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2021-2026.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelummnya Kecamatan Kembang Janggut mempunyai tujuan yaitu "*Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel",* yang artinya Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan

daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah. Meningkatkan sarana infrastruktur sebagai akses masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan partisipasi masyarakat / perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbangcam, meningkatkan kelancaran proses administrasi kependudukan dan meningkatkan keamanan lingkungan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu "*Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan*", yang artinya meningkatnya tertib administrasi pemerintah dan kualitas pelayanan publik dan meningkatnya Interkoneksitas antar wilayah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Kembang Janggut merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (PD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Kembang Janggut sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; dan Pembinaan pelayanan umum.

Penetapan Program dan kegiatan disamping menyesuaikan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang tingkat urgensinya tinggi terutama permasalahan Bidang Sarana dan Prasarana adalah penanggulangan banjir, sampah dan perbaikan sarana gang, serta jembatan sedangkan bidang sosial budaya adalah perbaikan RKB dan Peningkatan Sarana Posyandu memalui kegiatan PKK di wilayah Kecamatan Kembang Janggut.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dan uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

   Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Kembang Janggut diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Kembang Janggut merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati.

2. Pencapaian SDGs

   Suistainable Development Goals merupakan kesepakan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menanda tangani SDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menanda tangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target SGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Kembang Janggut diimplentasikan untuk mencapai target-target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

3. Pemberantasan Kemiskinan

   Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun

sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius.

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Demikian pula halnya dengan penanggunglan kemiskinan di Kecamatan Kembang Janggut. Program dan kegitan yang dirancang pada tahun anggaran 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pemberantasan kemisikinan pun menjadi salah satu indikator pencapaian kinerja didalam perjanjian kinerja antara Camat kepada Bupati, dimana terdapat 2(dua) indikator yaitu yang pertama membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah. Yang kedua melakukan pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Kembang Janggut.

4. Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan

mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Kembang Janggut diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Kembang Janggut sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki berbagai potensi ekonomi yang memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara. Potensi itu terutama terkait dengan bidang perkebunan kelapa sawit, dimana di Kecamatan Kembang Janggut terdapat beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta yang cukup besar dan juga kebun kelapa sawit rakyat yang ada diseluruh desa diwilayah Kecamatan Kembang Janggut. Selain kelapa sawit ada juga sarang burung walet yang bisa dikatakan cukup banyak.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk

lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Kembang Janggut melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

   Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023 adalah 6 Program dengan 15 Kegiatan yang terdiri dari 51 sub kegiatan.

2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

   Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kembang Janggut sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Kembang Janggut dan melingkupi semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.

Adapun secara detail akan kami sajikan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 pada tabel 4.1/ T-C.33 dibawah ini :

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025

dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kembang Janggut

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Kec.	Persen	100	1.251.739.000	DBH		Persen	100	130.000.000
						Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan		Persen	86,36	2.680.000.00	DBH		Persen	86,36	200.000.0

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0					000
7	01	02	2.0		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kec.	Kegiatan	24	400.000.000	DBH		Kegiatan	23	95.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	02	2.0	0	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec.	Kali	12	150.000.000	DBH	Fasilitasi Kegiatan Erau dan Stunting	Kali	12	50.000.000
7	01	02	2.0	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang	Kec.	Kegiatan	12	250.000.000	DBH	Fasilitasi Pelaksanaan	Kegiatan	11	45.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						dilaksanakan secara efektif						HUT-RI Dikecamatan			00
7	01	02	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec.	Kegiatan	2	100.000.000	DBH		Kali	0	-

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	02	2.0	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.	Kegiatan	2	100.000.000	DBH	Fasilitasi Kegiatan Pramuka dan Operasional Pokjana	Kali	0	-

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumber		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												1 Posyandu			
7	01	02	2.0		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec.	Kali	0	-	DBH		Kali	12	5.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	02	2.0	0	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec.	Kali	0	-	DBH		Kali	12	5.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	02	2.0		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kec.	Kegiatan	2	3.431.739.000	DBH		Kegiatan	2	230.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	02	2.0	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	Kec.	laporan	3	751.739.000	DBH	Pelimpahan Kewenangan Terkait Penanganan Darurat Bencana, Pengelolaan Sa	Berkas	26	30.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												mpah, dan Pelayanan PATEN			
7	01	02	2.0	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	Kec.	kegiatan	13	2.680.000.000	DBH	Pelimpahan Kewenangan Terkait Peningkatan Insf	kegiatan	1	200.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												ratrukturJalan dan Jembatan			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif	Kec.	Pesentas	100	586.000.000	DBH		Pesentas	100	310.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	03	2.0		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kec.	Kali	12	100.000.000	DBH		Kali	12	310.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	03	2.0	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.	Orang	50	50.000.000	DBH		Orang	30	35.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	03	2.0	0	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana oleh pihak Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec.	Kegiatan	0	-	DBH		Kegiatan	11	25.000.000
7	01	03	2.0	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	Kec.	laporan	2	50.000.000	DBH	Fasilitasi Lomba Desa	Kegiatan	100	250.000.

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kecamatan							dan Bulan Bakti Gotong Royong			000
7	01	03	2.0		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga yang dilaksanakan	Kec.	Kegiatan	5	486.000.000	DBH		Kegiatan	0	-

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	03	2.0	0	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang dilaksanakan	Kec.	Kegiatan	5	486.000.000	DBH	Fasilitasi Lin mas , Keg giat an HK G-PKK , Ope rasi onal PKK	Kegiatan	0	-

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												, Forum Anak dan Jambore PAUD.			
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Kec.	persen	100	175.000.000	DBH		persen	100	55.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan									
7	01	04	2.0		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.	Kegiatan	8	175.000.000	DBH		Kegiatan	8	55.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	04	2.0	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec.	Kegiatan	0	-	DBH		Kegiatan	4	40.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	04	2.0	0	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kec.	Kegiatan	4	175.000.000	DBH	Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kew	Kegiatan	4	15.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												aspadaan Dini Masyarakat dan Fasilitasi Kegiatan Safari Ramadhan			

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.	Persen	100	220.00 0.000	DBH		Persen	100	290.500.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	05	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kec.	Kegiatan	3	220.00 0.00	DBH		Kegiatan	5	290.500.000
7	01	05	2.0	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec.	Orang	0	-	DBH		Kegiatan	35	110.000.

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
															000
7	01	05	2.0	0	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan	Kec.	Kegiatan	1	210.000.000	DBH	Fasilitasi Kegiatan MTQ	Kegiatan	75	172.500.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional									
7	01	05	2.0	0	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.	Kegiatan	4	10.000.000	DBH		Kegiatan	1	8.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Kec.	Persen	45	50.000.000	DBH		Persen	55	50.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	06	2.0		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Kec.	Desa	11	50.000.000	DBH		Desa	11	50.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	06	2.0	0	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Kec.	Desa	11	50.000.000	DBH	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	11	50.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kec.	Poin	B (70)	7.990.814.578	DBH		Poin	B (74)	6.410.815.012
X	X	01	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kec.	dokume	26	605.000.000	DBH		dokume	58	65.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Daerah	Perangkat Daerah									00
X	X	01	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.	dokume	3	140.000.000	DBH	Penyusunan Dokumen Renstra, Renja dan	dokume	10	15.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												Renja Perubahan			
X	X	01	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kec.	dokume	2	5.000.000	DBH	Penyusunan Dokumen RKA dan DPA	dokume	7	10.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	01	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec.	dokume	2	5.000.000	DBH	Penyusunan Dokumen RKA Perubahan dan DPA Perubahan	dokume	7	7.500.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	01	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Kec.	dokume	0	-	DBH		dokume	7	10.000.000
X	X	01	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec.	dokume	0	-	DBH		dokume	7	7.500.00

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
															0
X	X	01	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.	laporan	20	70.000.000	DBH	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	laporan	7	7.500.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
X	X	01	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.	Kegiatan	4	60.000.000	DBH		Kegiatan	0	-

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	01	2.0	0	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec.	laporan	1	300 .00 0.0 00	DBH		laporan	0	-

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	01	2.0	1	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.	laporan	1	25.000.00 0	DBH		laporan	0	-
X	X	01	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang	Kec.	laporan	14	4.930.371 .19	DBH		laporan	37	4.529.87

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						akuntabel				4					1.628
X	X	01	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Kec.	orang	33	4.715.371.194	DBH	Perubahan Pagu Dikarenakan Ada Penam	orang	35	4.334.871.628

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												bahan Mutasi Masuk Pegawai			
X	X	01	2.0	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	Kec.	laporan	0	-	DBH		laporan	24	15.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	01	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.	laporan	1	25.000.000	DBH		laporan	5	15.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	01	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec.	laporan	12	165.000.000	DBH	Honorarium Bulanan Untuk PA, PPTK, PPK, dan Bendahara Pengeluaran	laporan	12	165.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	01	2.0	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec.	laporan	1	25.000.00 0	DBH		laporan	0	-
X	X	01	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasi	Kec.	unit	14	255.00 0.0 00	DBH		unit	55	32.5 00.0

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						kan									00
X	X	01	2.0	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec.	dokume	4	25.000.000	DBH		dokume	5	5.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	01	2.0	0	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	Kec.	unit	4	150.000.000	DBH		unit	5	7.500.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	01	2.0	0	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah	Kec.	Laporan	1	50.000.000	DBH		Laporan	0	-

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	01	2.0	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Kec.	laporan	4	30.000.00.0	DBH		laporan	5	10.000.00.000
X	X	01	2.0	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan	Kec.	Laporan	0	-	DBH		Laporan	5	10.000.00.0

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						penatausahaan									00
X	X	01	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian atau Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kec.	orang	43	75.000.000	DBH		orang	40	75.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	01	2.0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Kec.	Stel	43	75.000.000	DBH		Stel	40	75.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	01	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.	jenis	9	410.50.0.00	DBH		jenis	9	410.50.0.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	01	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kec.	Paket	1	5.000.000	DBH		Jenis	1	5.000.000
X	X	01	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kec.	Paket	1	55.000.000	DBH		unit	1	55.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
															00
X	X	01	2.0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kec.	Paket	1	20.000.000	DBH		unit	1	20.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	01	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kec.	Paket	1	58.000.000	DBH		unit	1	58.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	01	2.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kec.	Paket	1	7.500.000	DBH		unit	1	7.500.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	01	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kec.	Dokume	5	5.000.000	DBH		jenis	5	5.000.000
X	X	01	2.0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitas	Kec.	Bulan	12	15.000.000	DBH		kali	12	15.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
															00
X	X	01	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kec.	Laporan	12	200.000.000	DBH		kali	12	200.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	01	2.0	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	Kec.	Dokume	1	45.000.000	DBH		jenis	8	45.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	01	2,0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Kec.	Unit	3	890.00.0.00	DBH		Unit	3	400.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	01	2,0	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Kec.	Unit	2	640.000.000	DBH		Unit	1	150.000.000
X	X	01	2,0	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Kec.	Unit	1	150.000.000	DBH		Unit	1	150.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Lainnya	Lainnya yang diadakan									000
X	X	01	2,0	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Kec.	Unit	1	100.000.000	DBH		Unit	1	100.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	01	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kec.	bulan	12	387.50 0.000	DBH		bulan	12	307.500.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	01	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	Kec.	bulan	12	2.500.000	DBH		bulan	12	2.500.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	01	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.	bulan	12	170.000.000	DBH		bulan	12	90.000.000
X	X	01	2.0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Kec.	bulan	12	15.000.000	DBH		bulan	12	15.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kantor									00
X	X	01	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.	bulan	12	200.000.000	DBH		bulan	12	200.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	01	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kec.	unit	45	437.443.384	DBH		unit	78	590.443.384

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	01	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Kec.	unit	10	50.000.000	DBH		unit	10	203.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	01	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Kec.	unit	3	167.443.384	DBH		unit	3	167.443.384
X	X	01	2.0	0	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Kec.	unit	30	10.000.000	DBH		unit	30	10.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
															00
X	X	01	2.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kec.	unit	1	10.000.000	DBH		unit	25	10.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	01	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/ direhabilitasi	Kec.	unit	1	100.000.000	DBH		unit	5	100.000.000

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	01	2.0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipemelihara/ direhabilitasi	Kec.	unit	1	100.000.000	DBH		unit	5	100.000.000
						Jumlah				12.					7.

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Satuan	Target	Pagu Indikatif Rp.	Sumbe		Satuan	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										953.553.578					446.315.012

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Akhir Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kembang Janggut tahun 2021 – 2026 dan merupakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kembang Janggut Periode Tahun 2025.

Bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2025 dimaksud untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan serta dengan Rencana Kerja Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2025 ini juga diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Untuk itu mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ini, akan diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Kutai Kartanegara. Demikian untuk dilaksanakan.

eee.RENJA KECAMATAN TABANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2), pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/ kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan rencana kerja perangkat daerah, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki renja perangkat daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada rencana strategis perangkat daerah dan mengacu kepada rencana strategis perangkat daerah. Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dirumuskan kedalam rancangan rencana kerja perangkat daerah (RENJA PD) dan mengacu kepada RKPD, yang memuat program, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang dalam visi dan misi yang dicanangkan sejak terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2024 serta keberhasilan (*succes story*) pada pelaksanaan pembangunan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode sebelumnya.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum kecamatan dalam menyusun rancangan Renja Kecamatan Tabang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

   Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Tabang selama tahun 2025 dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD dan Renstra Kecamatan.

2. Tujuan :

   Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Camat Tabang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025 .

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Kantor Camat Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan.

BAB V. PENUTUP

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana Tindak Lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan pencapaian visi dan misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia diera globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum rencana kerja (Renja) Kecamatan Tabang Tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan Visi “MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BAHAGIA”. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan didalam renstra perangkat daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan ditahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Tabang telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya dan telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu :

1. Menyusun dokumen perencanaan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2025, mulai dari proses Musrenbang tingkat Desa, Musrenbang tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.
2. Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, pelaksanaan kinerja Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan Perangkat Daerah dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini:

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2023 S/D TAHUN 2023

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TABANG

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)			
										Target Renja-PD tahun (2023)		Realisasi Renja-PD tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
				Urusan																	
				Bidang Urusan																	
1				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%		
1	1			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			%	100	%												
1	1	1		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	Per-sen	1	Laporan	1	Laporan	100	Per-sen

1	1	2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4	Laporan	8	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	Persen	4	Laporan	4	Laporan	100	Persen
2				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	%			100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
2	1			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																	
2	1	1		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	24	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	Persen	12	Laporan	12	Laporan	100	Persen
2	2			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
2	2	1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	7	Lembaga Kemasyarakatan	14	Lembaga Kemasyarakatan	7	Lembaga Kemasyarakatan	7	Lembaga Kemasyarakatan	100	Persen	7	Lembaga Kemasyarakatan	7	Lembaga Kemasyarakatan	100	Persen
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional		1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Persen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Persen

				Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Per-sen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Per-sen
3				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		75	%		%		%		%		%	75	%	75	%	100	%
3	1			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah																	
3	1	1		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Per-sen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Per-sen
4				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		75	%	75	%	75	%	75	%		%	75	%	75	%	100	%
4	1			Fasilitasi, Rekomen-dasi dan Koordinasi																	
4	1	1		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Per-sen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Per-sen

4	1	2		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	19	Laporan	19	Laporan	19	Laporan	19	Laporan	100	Per-sen	19	Laporan	19	Laporan	100	Per-sen
5				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	%	0	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
5	1			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
5	1	1		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	Per-sen	1	Laporan	1	Laporan	100	Per-sen
5	2			Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
5	2	1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	Per-sen	1	Paket	1	Paket	100	Per-sen
5	2	2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	Per-sen	1	Paket	1	Paket	100	Per-sen
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	Per-sen	1	Paket	1	Paket	100	Per-sen

5	2	3		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	Laporan	200	Laporan	200	Laporan	200	Laporan	100	Persen	200	Laporan	200	Laporan	100	Persen
5	2	4		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	100	Persen	10	Dokumen	10	Dokumen	100	Persen
5	2	5		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	Persen	1	Paket	1	Paket	100	Persen
5	3			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
5	3	1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	Persen	1	Unit	1	Unit	100	Persen
5	3	1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	Persen	1	Unit	1	Unit	100	Persen
5	4			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
5	4	1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100	Persen	3	Laporan	3	Laporan	100	Persen

5	4	2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	Persen	1	Laporan	1	Laporan	100	Persen
5	5			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
5	5	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit	4	Unit	4	Unit	4	Unit	100	Persen	4	Unit	4	Unit	100	Persen
5	5	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Unit	11	Unit	11	Unit	11	Unit	100	Persen	11	Unit	11	Unit	100	Persen
5	5	3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2	Unit	1	Unit	1	Unit	100	Persen	2	Unit	2	Unit	100	Persen
5	5	4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	0	Unit	5	Unit	5	Unit	100	Persen	2	Unit	2	Unit	100	Persen
5	7			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

5	7	5		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	100	Persen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Persen
5	7	1		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Persen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Persen
5	7	2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Persen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Persen
5	7	3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	Persen	1	Dokumen	1	Laporan	100	Persen
5	7	4		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	Persen	1	Laporan	1	Laporan	100	Persen
5	7	6		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Persen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Persen

5	8			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
5	8	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	Orang/bulan	45	Orang/bulan	45	Orang/bulan	45	Orang/bulan	100	Persen	45	Orang/bulan	45	Orang/bulan	100	Persen
5	8	2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	Persen	2	Laporan	2	Laporan	100	Persen
5	8			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
5	8	1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumah Pakaian Yang Disediakan	45	stel	45	stel	45	stel	45	stel	100	Persen	0	Stel	45	Stel	0	Persen

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat program dan kegiatan yang masih belum mencapai target yang telah ditentukan, dikarenakan program dan kegiatan di tahun 2022 masih dalam proses berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan perangkat daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan profesional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan ditingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Disisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha dimanapun sesuai peruntukannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana. Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Tabang, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Tabang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar.
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat.
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada dinas instansi yang berada di wilayah kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Pelayanan kepada pemerintahan desa dan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tabang selama kurun waktu tahun 2022-2023 dinilai cukup. Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Tabang, yaitu :

1. Predikat akuntabilitas kinerja;
2. Predikat akuntabiitas kinerja Kecamatan Tabang;
3. Cakupan aksesibilitas antar wilayah Kecamatan Tabang. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan TabangKabupaten Kutai Kartanegara Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dalam pasal 126 menerangkan bahwa kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagaian wewenang Bupati/ Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, kecamatan juga merupakan perangkat daerah kabupaten/ kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sedang fungsi kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan kegiatan kecamatan.
2. Pelaksanaan koordinasi atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah kecamatan.
3. Pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan.
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.`
5. Pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan.
6. Pelaksanaan pelayanan umum kepada masyarakat.
7. Pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas layanan umum diwilayah kecamatan.
8. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan diwilayah kecamatan.
9. Pelaksanaan penatausahaan/ urusan kesekretariatan kecamatan.

Identifikasi permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Tabang dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya :

1. Permasalahan Internal :

a. Kualifikasi staf yang masih belum sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi.
b. Belum optimalnya jaringan internet yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dikelola oleh Diskominfo sehingga data-data dan laporan yang diproses melalui jaringan internet tidak bisa maksimal dilaksanakan di Kecamatan Tabang dan ada beberapa titik yang tersebar diwilayah desa yang masih Blank Spot (Tidak ada Jaringan).
c. Belum dapat dilaksanakannya beberapa poin pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat karena belum adanya petunjuk teknis serta belum disiapkannya tenaga teknis yang sudah terlatih.

2. Permasalahan Eksternal:
   a. Kesadaran masyarakat masih rendah untuk menyiapkan dan memiliki kelengkapan administrasi kependudukan serta dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh setiap warga yang merupakan produk layanan pemerintah kecamatan.
   b. Jarak antara desa-desa dan ibu kota kecamatan yang relatif jauh serta jalur transportasi yang masih sulit dan mahal menyebabkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa masih belum maksimal dilaksanakan.
   c. Belum maksimalnya keterlibatan pihak ketiga (perusahaan) dalam membantu kegiatan pemberdayaan dan pembangunan wilayah desa yang menjadi lokasi kegiatan usaha perusahaan tersebut.

Hal-hal yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada para staf kecamatan tentang tugas dan fungsi kecamatan serta keahlian yang harus dipelajari dan dimiliki oleh setiap staf.
2. Melaporkan kepada pihak Diskominfo untuk bisa memperbaiki jaringan internet di Kecamatan Tabang.
3. Melaksanakan jenis kewenangan yang sudah dapat dilaksanakan dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait jenis kewenangan yang belum bisa dilaksanakan.

4. Melakukan sosialisasi kepada aparatur desa dan warga desa tentang pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan serta dokumen-dokumen lainnya yang memang harus dimiliki oleh warga masyarakat.
5. Memaksimalkan rapat koordinasi pertriwulan dalam rangka melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan pemberdayaan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa.
6. Melibatkan pihak perusahan dalam kegiatan musrenbang desa dan musrenbang kecamatan dalam rangka sinkronisasi rencana kegiatan pemerintahan desa yang bisa dibantu dilaksanakan oleh pihak perusahaan.
7. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang status lahan KBK dan mengusulkan kepada pihak terkait untuk mengeluarkan sebagian lahan yang menjadi lokasi kegiatan usaha masyarakat yang termasuk dalam lahan KBK agar bisa dimiliki dan diusahakan oleh masyarakat.

Dari beberapa aspek permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Tabang sebagaimana diuraikan diatas, terdapat beberapa potensi yang dimiliki antara lain :

1. Potensi dibidang pertambangan yaitu terdapatnya perusahaan-perusahaan batubara yang berada di Desa Gunung Sari, Desa Umaq Dian, Desa Buluqsen, Desa Ritan Baru, dan Desa Tukung Ritan.
2. Potensi perkebunan kelapa sawit yaitu terdapatnya perkebunan kelapa sawit PT. Rea Kaltim Plantations yang arealnya sampai berlokasi di Desa Gunung Sari dan Desa Long Lalang.
3. Potensi Pertanian yaitu terdapatnya usaha pertanian padi sawah di Desa Sidomulyo, Desa Umaq Dian, Desa Kampung Baru, Desa Umaq Tukung dan dan padi ladang ada di desa-desa yang termasuk diwilayah Kecamatan Tabang,
4. Potensi Kayu yang sampai Tahun 2024 ini masih memiliki ijin penebangan yakni berada di Desa Muara Kebaq, Desa Muara Tuboq, Muara Belinau, Desa Muara Salung, dan Desa Muara Tiq yang termasuk diwilayah Kecamatan Tabang.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dalam pasal 126 menerangkan

bahwa Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagaian wewenang Bupati/ Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kecamatan juga merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sedang fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan kegiatan kecamatan.
2. Pelaksanaan koordinasi atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah kecamatan.
3. Pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan.
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.`
5. Pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan.
6. Pelaksanaan pelayanan umum kepada masyarakat.
7. Pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas layanan umum diwilayah kecamatan.
8. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan diwilayah kecamatan.
9. Pelaksanaan penatausahaan/ urusan kesekretariatan kecamatan.

Identifikasi permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Tabang dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya:

a. Permasalahan Internal:
    1. Kualifikasi staf yang masih belum sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi.
    2. Belum Optimalnya jaringan internet yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dikelola oleh Diskominfo sehingga data-data dan laporan yang diproses melalui jaringan internet tidak bisa maksimal dilaksanakan di Kecamatan Tabang dan ada beberapa titik yang tersebar diwilayah desa yang masih Blank Spot (Tidak ada Jaringan).
    3. Belum optimalnya jaringan layanan listrik di 13 Desa dan termasuk dikedudukan Kantor Camat Tabang yang saat ini hanya ada layanan listrik dalam waktu 12 Jam layanan dimulai dari pukul 17.00 wita sampai dengan pukul 07.00

wita, sehingga ini menjadi permasalahan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan sampai saat ini hanya bergantung pada mesin generator listrik pada saat jam aktivitas pelayanan. Hal ini pun tentunya dirasakan di 13 pemerintahan desa, harapannya kebutuhan dasar pokok masyarakat terhadap layanan jaringan listrik bisa lebih optimal yakni dalam 24 Jam.

4. Belum dapat dilaksanakannya beberapa point pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat karena belum adanya petunjuk teknis serta belum disiapkannya tenaga teknis yang sudah terlatih.

b. Permasalahan Eksternal:

1. Kesadaran masyarakat masih rendah untuk menyiapkan dan memiliki kelengkapan administrasi kependudukan serta dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh setiap warga yang merupakan produk layanan pemerintah kecamatan.
2. Jarak antara desa-desa dan ibu kota kecamatan yang relatif jauh serta jalur transportasi yang masih sulit dan mahal menyebabkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa masih belum maksimal dilaksanakan.
3. Belum maksimalnya keterlibatan pihak ketiga (perusahaan) dalam membantu kegiatan pemberdayaan dan pembangunan wilayah desa yang menjadi lokasi kegiatan usaha perusahaan tersebut.
4. Hal-hal yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :
   a. Memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada para staf kecamatan tentang tugas dan fungsi kecamatan serta keahlian yang harus dipelajari dan dimiliki oleh setiap staf.
   b. Melaporkan kepada pihak Diskominfo untuk bisa memperbaiki jaringan internet di Kecamatan Tabang.
   c. Melaksanakan jenis kewenangan yang sudah dapat dilaksanakan dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait jenis kewenangan yang belum bisa dilaksanakan.

d. Melakukan sosialisasi kepada aparatur desa dan warga desa tentang pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan serta dokumen-dokumen lainnya yang memang harus dimiliki oleh warga masyarakat.
e. Memaksimalkan rapat koordinasi pertriwulan dalam rangka melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan pemberdayaan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa.
f. Melibatkan pihak perusahan dalam kegiatan musrenbang desa dan musrenbang kecamatan dalam rangka sinkronisasi rencana kegiatan pemerintahan desa yang bisa dibantu dilaksanakan oleh pihak perusahaan.
g. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang status lahan KBK dan mengusulkan kepada pihak terkait untuk mengeluarkan sebagian lahan yang menjadi lokasi kegiatan usaha masyarakat yang termasuk dalam lahan KBK agar bisa dimiliki dan diusahakan oleh masyarakat.

5. Dari beberapa aspek permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Tabang sebagaimana diuraikan diatas, terdapat beberapa potensi yang dimiliki antara lain :
6. Potensi dibidang pertambangan yaitu terdapatnya perusahaan-perusahaan batubara yang berada di Desa Gunung Sari, Desa Umaq Dian, Desa Buluqsen, Desa Ritan Baru, dan Desa Tukung Ritan.
7. Potensi perkebunan kelapa sawit yaitu terdapatnya perkebunan kelapa sawit PT. Rea Kaltim Plantations yang arealnya sampai berlokasi di Desa Gunung Sari dan Desa Long Lalang.
8. Potensi Pertanian yaitu terdapatnya usaha pertanian padi sawah di Desa Sidomulyo, Desa Umaq Dian, Desa Kampung Baru, Desa Umaq Tukung dan dan padi ladang ada di desa-desa yang termasuk diwilayah Kecamatan Tabang,

2. Potensi Kayu yang sampai Tahun 2020 ini masih memiliki ijin penebangan yakni berada di Desa Muara Kebaq, Desa Muara Tuboq, Muara Belinau, Desa Muara Salung, dan Desa Muara Tiq yang termasuk diwilayah Kecamatan Tabang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/ tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan dilihat pada tabel T-C. 31, sebagaimana berikut.

TABEL T-C.31

RUMUSAN RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN OPD KECAMATAN TABANG TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	*Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub.Kegiatan	*Lokasi*	*Indikator Kinerja*	*Target Capaian*	*Pagu Indikatif*	*Program / Kegiatan/ Sub.Kegiatan*	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.01	*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*				*6.951.207.032*	*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*				11.106.595.955	-
7.01.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*1 Indikator*	*1 Indikator*	*400.000.000*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		1 Indikator	1 Indikator	400.000.000	-
7010120101	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		*2*	*2*	*50.000.000*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2	2	50.000.000	
7010120102	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		*2*	*2*	*50.000.000*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		2	2	50.000.000	
7010120103	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*		*2*	*2*	*50.000.000*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*		2	2	50.000.000	
7010120104	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*		*1*	*1*	*50.000.000*	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*		1	1	50.000.000	-
7010120105	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD*		*3*	*3*	*50.000.000*	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD*		3	3	50.000.000	
7010120106	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*		*2*	*2*	*150.000.000*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*		2	2	150.000.000	

No	*Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub.Kegiatan	*Lokasi*	*Indikator Kinerja*	*Target Capaian*	*Pagu Indikatif*	*Program / Kegiatan/ Sub.Kegiatan*	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*1 Indikator*	*1 Indikator*	*5.011.869.280*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		1 Indikator	1 Indikator	7.233.182.955	-
7010120201	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*		*1*	*1*	*4.906.509.280*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*		1	1	7.083.182.955	Kekurangan TPP
7010120205	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		*1*	*1*		*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1	1		-
7010120207	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*		*2*	*2*	*105.360.000*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*		2	2	150.000.000	
7.01.01.2.03	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*		*1 Indikator*	*1 Indikator*	*17.900.000*	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*		1 Indikator	1 Indikator	50.000.000	-
7010120305	*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*		*2*	*2*	*17.900.000*	*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*		2	2	50.000.000	5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kekurangan Honor Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dan

No	*Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub.Kegiatan	*Lokasi*	*Indikator Kinerja*	*Target Capaian*	*Pagu Indikatif*	*Program / Kegiatan/ Sub.Kegiatan*	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
											Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah
7.01.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*1 Indikator*	*1 Indikator*	-	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		1 Indikator	1 Indikator	99.296.000	-
7010120502	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*		*1*	*1*	-	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*		1	1	99.296.000	
						- Pengadaan Pakaian Tradisional /Miskat			*58 Stel*	99.296.000	*Belum adanya Pakaian Miskat dengan ciri khas batik tradisional asli setempat*
70101206	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*1 Indikator*	*1 Indikator*	*251.933.880*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		1 Indikator	1 Indikator	915.697.000	-
7010120601	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*		*2*	*2*	*5.000.000*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*		2	2	5.000.000	
7010120602	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*		*2*	*2*	*25.120.880*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*		2	2	285.697.000	
						- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Personal komputer			*9 Unit*	123.340.000	*Peralatan Kantor yang masih kurang*
						- Pengadaan Perlengkapan Kantor			*56 Unit*	162.357.000	*Perlengkapan Kantor*

No	*Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub.Kegiatan	*Lokasi*	*Indikator Kinerja*	*Target Capaian*	*Pagu Indikatif*	*Program / Kegiatan/ Sub.Kegiatan*	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
											yang masih kurang
7010120604	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*		*2*	*2*	*21.813.000*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*		2	2	75.000.000	
7010120605	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*		*2*	*2*	-	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*		2	2		
7010120609	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		*2*	*2*	*150.000.000*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		2	2	500.000.000	
7010120610	*Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*		*2*	*2*	*50.000.000*	*Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*		2	2	50.000.000	
701012007	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*1 Indikator*	*1 Indikator*	*180.000.000*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		1 Indikator	1 Indikator	710.000.000	-
7010120702	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*		*2*	*2*	*180.000.000*	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*		2	2	710.000.000	5.2.02.02.01.0002. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang -Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang .1.Kendaraan Dinas Operasional Trantib OPD Spesifikasi : ..,,Double Cabin 4x4,

No	*Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub.Kegiatan	*Lokasi*	*Indikator Kinerja*	*Target Capaian*	*Pagu Indikatif*	*Program / Kegiatan/ Sub.Kegiatan*	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
											2500 cc dan Sewa 2.Kendaraan Oprasional Kecamatan
						5.2.02.02.01.0002. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang - Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang.1.Kendaraan Dinas Operasional Trantib OPD Spesifikasi : ..,,Double Cabin 4x4, 2500 cc				*520.000.000*	*Belum Adanya Kendaraan Dinas Operasional Untuk Tramtib OPD Spesifikasi Double Cabin dan Sewa Kendaran Operasional Kecamatan*
						Sewa Kendaraan Oprasional Kecamatan Double Cabin 4x4, 2500 cc				*190.000.000*	*Sewa Kendaran Operasional Kecamatan*
701012 08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*1 Indikator*	*1 Indikator*	*263.152.242*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		1 Indikator	1 Indikator	310.000.000	-
701012 0802	*Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik*		*2*	*2*	*31.800.000*	*Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik*		2	2	60.000.000	
701012 0804	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*		*2*	*2*	*231.352.242*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*		2	2	250.000.000	Kekurangan THR THL
701012 09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*1 Indikator*	*1 Indikator*	*826.351.630*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		1 Indikator	1 Indikator	1.388.420.000	-

No	*Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub.Kegiatan	*Lokasi*	*Indikator Kinerja*	*Target Capaian*	*Pagu Indikatif*	*Program / Kegiatan/ Sub.Kegiatan*	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7010120901	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*		*2*	*2*	*112.420.000*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*		2	2	112.420.000	
7010120902	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*		*2*	*2*	*200.000.000*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*		2	2	200.000.000	
7010120909	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*		*2*	*2*	*400.000.000*	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*		2	5	500.000.000	
						-Pembangunan Gudang			*1 Unit*	*110.000.000*	*untuk penyimpanan Arsip Kecamatan dan barang-barang Aset kecamatan*
						- Rehab Rumah Dinas Gol 3			*1 Unit*	*180.000.000*	*Dinaikan sering kena Banjir*
						- Rehab Ruang Pelayanan Umum/ Paten			*1 Unit*	*150.000.000*	*Demi kenyaman Pelayanan Masyarakat*
						-Ruang laktasi (fasilitas ibu menyusui)			*1 Unit*	*50.000.000*	*fasilitas ibu menyusui*
						- Belanja Menambah Daya Listrik			*1 Unit*	*10.000.000*	*Sangat di perlukan karena kekurangan daya*

No	*Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub.Kegiatan	*Lokasi*	*Indikator Kinerja*	*Target Capaian*	*Pagu Indikatif*	*Program / Kegiatan/ Sub.Kegiatan*	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7010120910	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*		*2*	*2*	*113.931.630*	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*		2	2	576.000.000	
						- Membuat Pagar Kantor Kecamata Tabang			*200 Meter*	*400.000.000*	*Sangat di perlukan karena kondisnya banyak hewan liar masuk(anjing)*
						- Pembuatan Taman Kantor Camat			*1 Unit*	*176.000.000*	*Yang ada tidak layak*
7.01.02	*PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK*				*1.220.000.000*	*PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK*				3.350.000.000	-
7.01.02.2.04	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*		*1 Indikator*	*1 Indikator*	*1.220.000.000*	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*		1 Indikator	1 Indikator	3.350.000.000	-
7010220402	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan*		*2*	*2*	*20.000.000*	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan*		2	1	300.000.000	
						- Fasilitasi Pelaksanaan PATEN (Pusat Satu Data)			*1*	*300.000.000*	
7010220403	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*		*3*	*3*	*1.200.000.000*	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*		3	17	3.050.000.000	
						- Pembangunan Pendistribusian Jaringan Air Bersih			*1*	*200.000.000*	*Belum Adanya Jaringan Air Bersih*

No	*Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub.Kegiatan	*Lokasi*	*Indikator Kinerja*	*Target Capaian*	*Pagu Indikatif*	*Program / Kegiatan/ Sub.Kegiatan*	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						- Peningkatan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Badan Jalan Usaha Tani)			*1*	*200.000.000*	*Belum adanya akses Jalan Usaha Tani*
						- Peningkatan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Badan Jalan Usaha Tani)			*1*	*200.000.000*	*Jalan Belum disemenisasi*
						- Peningkatan Jalan Penghubung Desa Muara Pedohon Ke Desa Bila Talang			*1*	*200.000.000*	*Jalan yang ada sudah rusak berlubang-lubang*
						- Peningkatan Jalan Utama Penghubung Desa Umaq Dian dengan Desa Muara Pedohon			*1*	*200.000.000*	*Jalan yang ada rusak berat berlubang-lubang*
						- Pembangunan Pipa Pendistribusian Air Bersih Desa Muara Ritan			*1*	*200.000.000*	*Belum adanya Pipa Pendistribusian Air Bersih*
						- Semenisasi Jalan Poros Desa Muara Tiq			*1*	*200.000.000*	*Jalan yang ada sudah rusak berat*
						- Pembangunan Turap Desa Muara Salung			*1*	*200.000.000*	*Sering terjadi longsor saat musim penghujan*
						- Lanjutan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Milenia Jenau Makmur			*1*	*200.000.000*	*Jalan yang ada rusak dan belumpur saat musim penghujan*

No	*Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub.Kegiatan	*Lokasi*	*Indikator Kinerja*	*Target Capaian*	*Pagu Indi-katif*	*Program / Kegiatan/ Sub.Kegiatan*	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						- Pembersihan Badan Jalan Kelompok Tani Desa Muara Belinau			*1*	*150.000.000*	*Badan jalan kelompok tani yang ada tidak terpelihara*
						- Peningkatan Semenisasi Jalan menuju Tempat Ibadah Desa Tabang Lama			*1*	*200.000.000*	*Jalan yang ada belubang dan belumpur jika musim penghujan*
						- Rehab Sedang Gedung serba Guna Desa Sidomulyo			*1*	*200.000.000*	*Gedung Serbaguna yang ada rusak ringan*
						- Peningkatan Saluran Irigasi Induk Usaha Tani			*1*	*200.000.000*	*Saluran Irigasi usaha Tani yang ada sudah yang rusak*
						- Pengadaan/ Penambahan Lampu Jalan Solar sel Desa Muara Pedohon			*1*	*150.000.000*	*Jalan masih gelap belum ada lampu penerangan nya*
						- Semenisasi Jalan Desa Umaq Bekuay			*1*	*200.000.000*	*Jalan yang ada belubang dan belumpur*

No	*Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub.Kegiatan	*Lokasi*	*Indikator Kinerja*	*Target Capaian*	*Pagu Indikatif*	*Program / Kegiatan/ Sub.Kegiatan*	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
											jika musim penghujan
						- Fasilitasi Dan Monitoring Pelaksanaan Pilkades dan Pemilihan Anggota BPD di Kecamatan Tabang			*1*	*100.000.000*	*Adanya pelaksanan pemilihan Kepala Desa dan BPD serentak di wilayah Kecamatan Tabang*
						- Fasilitasi Dan Monitoring Pelaksanaan Lomba Desa dan Lomba RTdi Kecamatan Tabang			*1*	*50.000.000*	*Adanya Kegiatan Lomba Desa dan Lomba RT di Kecamatan Tabang sesuai surat dari sekda No P.82/SETDAKAB KUKAR/400.10.2/02/2024*
7.01.03	*PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN*				*131.264.370*	*PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN*				841.000.000	-
7.01.03.2.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*		*1 Indikator*	*1 Indikator*	*131.264.370*	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*		1 Indikator	1 Indikator	841.000.000	-

No	*Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub.Kegiatan	*Lokasi*	*Indikator Kinerja*	*Target Capaian*	*Pagu Indikatif*	*Program / Kegiatan/ Sub.Kegiatan*	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7010320101	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*		*2*	*2*	*30.000.000*	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*		2	2	30.000.000	
7010320103	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*		*2*	*2*	*101.264.370*	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*		5	5	811.000.000	
						- Pelaksanaan Kegiatan Pramuka			*1 Kegiatan*	*25.000.000*	
						- Pelaksanaan Kegiatan Operasional PKK			*1 Kegiatan*	*213.312.000*	
						- Pelaksanaan Perayaan HUT RI			*1 Kegiatan*	*186.688.000*	
						- Pelaksanaan Kegiatan Honorarium Linmas			*1 Kegiatan*	*186.000.000*	
						- Pelaksanaan HKG Tingkat Kabupaten			*1 Kegiatan*	*200.000.000*	*Adanya pelaksanaan Kegiatan HKG Tingkat Kabupaten*
7.01.05	*PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM*				*300.000.000*	*PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM*				230.000.000	-
7.01.05.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*		*1 Indikator*	*1 Indikator*	*300.000.000*	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*		1 Indikator	1 Indikator	230.000.000	-
7010520102	*Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*		*2*	*2*	*100.000.000*	*Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*		2	2	60.000.000	

No	*Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub.Kegiatan	*Lokasi*	*Indikator Kinerja*	*Target Capaian*	*Pagu Indikatif*	*Program / Kegiatan/ Sub.Kegiatan*	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7010520103	*Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*		*2*	*2*	*100.000.000*	*Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*		2	2	60.000.000	
7010520104	*Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional*		*2*	*2*	*50.000.000*	*Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional*		2	2	60.000.000	
7010520108	*Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*		*2*	*2*	*50.000.000*	*Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*		2	2	50.000.000	
7.01.06	*PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA*				*95.000.000*	*PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA*				95.000.000	-
7.01.06.2.01	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*		*1 Indikator*	*1 Indikator*	*95.000.000*	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*		1 Indikator	1 Indikator	95.000.000	-
7010620103	*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*		*2*	*2*	*50.000.000*	*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*		2	2	50.000.000	
7010620117	*Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*		*2*	*2*	*45.000.000*	*Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*		2	2	45.000.000	
Total					*8.697.471.402*	-				15.622.595.955	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana kerja (Renja) Kecamatan Tabang Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026. Rencana kerja Kecamatan Tabang Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan : "Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara/ Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/ Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/ Kota dan Provinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan didalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2023, agar didalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Tabang dituntut untuk siap dan sanggup membuat/ menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Berikut ini usulan program dan kegiatan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang):

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan dokumen rencana pembanguan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD Ke-Empat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025. Oleh sebab itu penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati/ Wakil Bupati Kutai Kartanegara masa bakti tahun 2021-2026, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 tahun 2010 tentang RPJPD.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 memperhatikan 9 (Sembilan) prioritas pembangunan Nasional yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN tahun 2020-2024. Hal ini untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kebijakan Pembangunan Nasional. Prioritas Pembangunan nasional 2020-2024 adalah :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia Lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati dan arah kebijakan keuangan daerah.

RPJMD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPKD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, serta memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah :

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BAHAGIA”.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka

misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani,
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya,
3. Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif,
4. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, dan
5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra PD merupakan Penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara. Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arahan kebijakan, serta program dan kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Rencana strategis PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam rencana kerja (RENJA-PD) dan rencana kerja anggaran PD (RKA-PD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkan kedalam rencana kerja pemerintah daerah (RPKD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musrenbang Kabupaten Kutai Kartanegara dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran, serta bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Rencana kerja pembangunan daerah, yang merupakan rencana tahunan pembangunan daerah, maka pada tahun 2025 yang merupakan tahap ke-tiga pelaksanaan RPJMD 2021-2026 ditetapkan

tema pembangunan Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

"PEMANTAPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK AKSELERASI DAN TRANSFORMASI PEMBANGUNAN"

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Hilirisasi pemanfaatan potensi unggulan daerah.
2. Pengembangan pola investasi daerah berbasis masyarakat.
3. Penguatan pembangunan pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata sebagai sumber utama peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan pendapatan masyarakat secara mandiri dan berkontribusi maksimal untuk perekonomian daerah.
4. Pemantapan pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya yang mendukung sentra produksi dan daerah potensi unggulan daerah.
5. Pemantapan interkoneksitas antar wilayah khususnya antar desa antar kecamatan.
6. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan menuju masyarakat lebih sejahtera.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan misi Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dijabarkan kembali kedalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan. Maka untuk itu tujuan strategis Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum
		Pertumbuhan pendapatan asli desa
		Pertumbuhan pendapatan asli daerah kewenangan kecamatan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Kantor Camat Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) Kantor Camat Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026. Pada dasarnya rencana kerja tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Kantor Camat Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025. Target kinerja mereprensentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan rencana strategis (Renstra), Kantor Camat Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Kantor Camat Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Kantor Camat Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai tabel berikut :

Tabel T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NAMA PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN TABANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				11.106.595.955		-		6.951.207.032
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Indikator		1 Indikator	400.000.000		-	1 Indikator	400.000.000
7010120101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tabang	2	50.000.000			7 Dokumen	50.000.000
7010120102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Tabang	2	50.000.000			1 Dokumen	50.000.000
7010120103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kec. Tabang	2	50.000.000			1 Dokumen	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
7010120104	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tabang	1	50.000.000		-	1 Laporan	50.000.000
7010120105	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Tabang	3	50.000.000			1 Dokumen	50.000.000
7010120106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tabang	2	150.000.000			1 Laporan	150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Indikator		1 Indikator	7.233.182.955		-	1 Indikator	5.011.869.280
7010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tabang	1	7.083.182.955		Kekurangan TPP	50 Orang/bulan	4.906.509.280
7010120205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Kec. Tabang	1			-	1	
7010120207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Tabang	2	150.000.000			2 Laporan	105.360.000
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Indikator		1 Indikator	50.000.000		-	1 Indikator	17.900.000
7010120305	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Tabang	2	50.000.000		5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Kekurangan Honor Pejabat Pengelola	1 Laporan	17.900.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Barang Milik Daerah dan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah		
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Indikator		1 Indikator	99.296.000		-	1 Indikator	-
7010120502	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Tabang	1	99.296.000			1 Paket	-
	- Pengadaan Pakaian Tradisional /Miskat			*58 Stel*	99.296.000		*Belum adanya Pakaian Miskat dengan ciri khas batik tradisional asli setempat*		
701012 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Indikator		1 Indikator	915.697.000		-	1 Indikator	251.933.880
7010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Tabang	2	5.000.000			1 Paket	5.000.000
7010120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Tabang	2	285.697.000			1 Paket	25.120.880
	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Personal komputer			*9 Unit*	123.340.000		*Peralatan Kantor yang masih kurang*		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	- Pengadaan Perlengkapan Kantor			*56 Unit*	162.357.000		*Perlengkapan Kantor yang masih kurang*		
7010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Tabang	2	75.000.000			1 Paket	21.813.000
7010120605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2	Kec. Tabang	2				2	-
7010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tabang	2	500.000.000			200 Laporan	150.000.000
7010120610	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Tabang	2	50.000.000			10 Dokumen	50.000.000
701012 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Indikator		1 Indikator	710.000.000		-	1 Indikator	180.000.000
7010120702	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec. Tabang	2	710.000.000		5.2.02.02.01.0002. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang -Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang.1.Kendaraan Dinas Operasional Trantib OPD Spesifikasi : ..,,Double Cabin 4x4,	1 Unit	180.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							2500 cc dan Sewa 2.Kendaraan Oprasional Kecamatan		
	5.2.02.02.01.0002. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang -Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang.1.Kendaraan Dinas Operasional Trantib OPD Spesifikasi : ..,,Double Cabin 4x4, 2500 cc				*520.000.000*		*Belum Adanya Kendaraan Dinas Operasional Untuk Tramtib OPD Spesifikasi Double Cabin dan Sewa Kendaran Operasional Kecamatan*		
	Sewa Kendaraan Oprasional Kecamatan Double Cabin 4x4, 2500 cc				*190.000.000*		*Sewa Kendaran Operasional Kecamatan*		
7010120 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Indikator		1 Indikator	310.000.000		-	1 Indikator	263.152.242
7010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Tabang	2	60.000.000			3 Laporan	31.800.000
7010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Tabang	2	250.000.000		Kekurangan THR THL	1 Laporan	231.352.242
7010120 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Indikator		1 Indikator	1.388.420.000		-	1 Indikator	826.351.630
7010120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan	Kec. Tabang	2	112.420.000			4 Unit	112.420.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
7010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Tabang	2	200.000.000			11 Unit	200.000.000
7010120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Tabang	5	500.000.000			2 Unit	400.000.000
	-Pembangunan Gudang			*1 Unit*	*110.000.000*		*untuk penyimpanan Arsip Kecamatan dan barang-barang Aset kecamatan*		
	- Rehab Rumah Dinas Gol 3			*1 Unit*	*180.000.000*		*Dinaikan sering kena Banjir*		
	- Rehab Ruang Pelayanan Umum/ Paten			*1 Unit*	*150.000.000*		*Demi kenyaman Pelayanan Masyarakat*		
	-Ruang laktasi (fasilitas ibu menyusui)			*1 Unit*	*50.000.000*		*fasilitas ibu menyusui*		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	- Belanja Menambah Daya Listrik			*1 Unit*	*10.000.000*		*Sangat di perlukan karena kekurangan daya*		
7010120910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Tabang	2	576.000.000			5 Unit	113.931.630
	- Membuat Pagar Kantor Kecamata Tabang			*200 Meter*	*400.000.000*		*Sangat di perlukan karena kondisnya banyak hewan liar masuk(anjing)*		
	- Pembuatan Taman Kantor Camat			*1 Unit*	*176.000.000*		*Yang ada tidak layak*		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.350.000.000		-		1.220.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 Indikator		1 Indikator	3.350.000.000		-	1 Indikator	1.220.000.000
7010220402	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec. Tabang	1	300.000.000			1 Laporan	20.000.000
	- Fasilitasi Pelaksanaan PATEN (Pusat Satu Data)			*1*	*300.000.000*				
7010220403	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tabang	17	3.050.000.000			4 Laporan	1.200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	- Pembangunan Pendistribusian Jaringan Air Bersih			*1*	*200.000.000*		*Belum Adanya Jaringan Air Bersih*	*1*	
	- Peningkatan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Badan Jalan Usaha Tani)			*1*	*200.000.000*		*Belum adanya akses Jalan Usaha Tani*	*1*	
	- Peningkatan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Badan Jalan Usaha Tani)			*1*	*200.000.000*		*Jalan Belum disemenisasi*	*1*	
	- Peningkatan Jalan Penghubung Desa Muara Pedohon Ke Desa Bila Talang			*1*	*200.000.000*		*Jalan yang ada sudah rusak berlubang-lubang*	*1*	
	- Peningkatan Jalan Utama Penghubung Desa Umaq Dian dengan Desa Muara Pedohon			*1*	*200.000.000*		*Jalan yang ada rusak berat berlubang-lubang*	*1*	
	- Pembangunan Pipa Pendistribusian Air Bersih Desa Muara Ritan			*1*	*200.000.000*		*Belum adanya Pipa Pendistribusian Air Bersih*	*1*	
	- Semenisasi Jalan Poros Desa Muara Tiq			*1*	*200.000.000*		*Jalan yang ada sudah rusak berat*	*1*	
	- Pembangunan Turap Desa Muara Salung			*1*	*200.000.000*		*Sering terjadi longsor saat musim penghujan*	*1*	
	- Lanjutan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Milenia Jenau Makmur			*1*	*200.000.000*		*Jalan yang ada rusak dan belumpur saat musim penghujan*	*1*	
	- Pembersihan Badan Jalan Kelompok Tani Desa Muara Belinau			*1*	*150.000.000*		*Badan jalan kelompok tani yang ada tidak terpelihara*	*1*	
	- Peningkatan Semenisasi Jalan menuju Tempat Ibadah Desa Tabang Lama			*1*	*200.000.000*		*Jalan yang ada belubang dan belumpur jika musim penghujan*	*1*	
	- Rehab Sedang Gedung serba Guna Desa Sidomulyo			*1*	*200.000.000*		*Gedung Serbaguna yang ada rusak ringan*	*1*	
	- Peningkatan Saluran Irigasi Induk Usaha Tani			*1*	*200.000.000*		*Saluran Irigasi usaha Tani yang ada sudah yang rusak*	*1*	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	- Pengadaan/ Penambahan Lampu Jalan Solar sel Desa Muara Pedohon			*1*	*150.000.000*		*Jalan masih gelap belum ada lampu penerangannya*	*1*	
	- Semenisasi Jalan Desa Umaq Bekuay			*1*	*200.000.000*		*Jalan yang ada belubang dan belumpur jika musim penghujan*	*1*	
	- Fasilitasi Dan Monitoring Pelaksanaan Pilkades dan Pemilihan Anggota BPD di Kecamatan Tabang			*1*	*100.000.000*		*Adanya pelaksanan pemilihan Kepala Desa dan BPD serentak di wilayah Kecamatan Tabang*	*1*	
	- Fasilitasi Dan Monitoring Pelaksanaan Lomba Desa dan Lomba RTdi Kecamatan Tabang			*1*	*50.000.000*		*Adanya Kegiatan Lomba Desa dan Lomba RT di Kecamatan Tabang sesuai surat dari sekda No P.82/SETDAKAB KUKAR/400.10.2/02/2024*	*1*	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				841.000.000		-		131.264.370
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Indikator		1 Indikator	841.000.000		-	1 Indikator	131.264.370
7010320101	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Kec. Tabang	2	30.000.000			7 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7010320103	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tabang	5	811.000.000			12 Laporan	101.264.370
	- Pelaksanaan Kegiatan Pramuka			*1 Kegiatan*	*25.000.000*				
	- Pelaksanaan Kegiatan Operasional PKK			*1 Kegiatan*	*213.312.000*				
	- Pelaksanaan Perayaan HUT RI			*1 Kegiatan*	*186.688.000*				
	- Pelaksanaan Kegiatan Honorarium Linmas			*1 Kegiatan*	*186.000.000*				
	- Pelaksanaan HKG Tingkat Kabupaten			*1 Kegiatan*	*200.000.000*		*Adanya pelaksanaan Kegiatan HKG Tingkat Kabupaten*		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				230.000.000		-		300.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Indikator		1 Indikator	230.000.000		-	1 Indikator	300.000.000
7010520102	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	Kec. Tabang	2	60.000.000			1 Kegiatan	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang difasilitasi							
7010520103	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Tabang	2	60.000.000			1 Kegiatan	100.000.000
7010520104	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Tabang	2	60.000.000			1 Kegiatan	50.000.000
7010520108	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Tabang	2	50.000.000			1 Dokumen	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				95.000.000		-		95.000.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Indikator		1 Indikator	95.000.000		-	1 Indikator	95.000.000
7010620103	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tabang	2	50.000.000			1 Dokumen	50.000.000
7010620117	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Tabang	2	45.000.000			19 Laporan	45.000.000
Total					15.622.595.955				8.697.471.402

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Tabang Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun.

Rencana kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tabang.

Rencana Kerja Kecamatan Tabang Tahun 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2025. dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh kecamatan, penyusunan rencana kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Tabang.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Kecamatan Tabang ini juga masih terdapat kekurang-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Kecamatan Tabang Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

fff.RENJA KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Akhir OPD atau selanjutnya disebut Renja Akhir adalah dokumen perencanaan Tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam kurun waktu satu Tahun berjalan. Renja Akhir OPD disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Akhir Pemerintah Daerah.

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Kota Bangun Darat secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya Rencana Kerja Akhir secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan Sumber Daya Manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu Tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Kota Bangun Darat menyusun Renja Akhir OPD Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kota Bangun Darat. Renja Akhir Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2025 mengacu pada RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan dalam menyusun Rencana Kerja Akhir Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Akhir Perangkat Daerah Tahun 2025 ini adalah Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Kota Bangun Darat selama Tahun 2025 dengan berpedoman pada Rancangan RKPD dan Renstra Kecamatan.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen Renja Akhir Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah untuk Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Camat Kota Bangun Darat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Akhir Kantor Camat Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA AKHIR PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Akhir Perangkat Daeah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Akhir Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA AKHIR DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA AKHIR PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Akhir Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Akhir Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Akhir Perangkat Daerah Tahun 2023 dan perkiraan capaian Renja Akhir Perangkat Daerah Tahun 2024. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi anggaran Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Akhir Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023 masih menggunakan hasil dari Kota Bangun induk yang mana ada beberapa desa yang dulunya masih tergabung dalam Kecamatan Kota Bangun Induk, oleh sebab itu Evaluasi ini digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Akhir Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Akhir Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Akhir Kecamatan Kota Bangun Darat yang masih tergabung dalam Kota Bangun Induk Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA AKHIR PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Akhir-PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja Akhir-PD Tahun 2023	Realisasi Renja Akhir-PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7					Urusan Kewilayahan									
7	01				Urusan Kecamatan									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100		100	100	100	100	100	100
						Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	71,43		71,43	71,43	100	78,5	78,5	100
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	11		1	1	100	2	2	2
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	7200		1200	1200	100	1200	2400	33,33

7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100		100	100	100	100	100	100
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	12		2	2	100	2	2	2
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	900		150	150	100	150	300	33,33
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	13		5	5	100	4	9	69,23
7	01	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB		B	B	100	B	B	B
7	01	01.	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	131		21	21	100	22	22	22
7	01	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13		3	3	100	2	5	38,46
7	01	01.	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26		6	6	100	4	10	38,46
7	01	01.	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72		12	12	100	12	24	33,33
7	01	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	112		12	12	100	20	20	20
7	01	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	216		36	36	100	36	72	33,33
7	01	01.	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	102		12	12	100	18	30	29,41
7	01	01.	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	92		12	12	100	16	16	16
7	01	01.	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	32		12	12	100	4	16	50,00

7	01	01.	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	300		50	50	100	50	50	50
7	01	01.	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	270		20	20	100	50	70	25,93
7	01	01.	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	61		7	7	100	10	10	10
7	01	01.	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	31		6	6	100	5	11	35,48
7	01	01.	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	90		15	15	100	15	30	33,33
7	01	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	90		15	15	100	15	30	33,33
7	01	01.	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12		2	2	100	2	4	33,33
7	01	01.	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12		2	2	100	2	4	33,33
7	01	01.	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	2100		100	100	100	400	500	23,81
7	01	01.	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	7200		1200	1200	100	1200	2400	33,33
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	360		60	60	100	60	60	60
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	299		129	129	100	34	163	54,52
7	01	01.	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	72		12	12	100	12	12	12
7	01	01.	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	72		12	12	100	12	24	33,33

7	01	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72		12	12	100	12	24	33,33
7	01	01.	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72		12	12	100	12	24	33,33
7	01	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	252		17	17	100	47	47	47
7	01	01.	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	75		15	15	100	12	27	36,00
7	01	01.	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	12		2	2	100	2	4	33,33

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat program dan kegiatan yang melebihi target, terdapat beberapa program dan kegiatan yang memenuhi target dan beberapa program dan kegiatan yang tidak memenuhi target. Adapun program dan kegiatan yang tidak memenuhi target disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

1. Perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Nilai pagu pada APBD lebih kecil dari nilai pada Renja Akhir.

Hal-hal yang diambil dalam mengatasi hal-hal tersebut adalah:

1. Melakukan pergeseran anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan.
2. Mengurangi dan menghapus beberapa sub kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagaian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat yaitu meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Urusan wajib adalah urusan Pemerintahan yang diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:

1. Bidang ketenagakerjaan, pelayanan pemberian kartu pendaftaran I(AK/1) kepada pencari kerja;

2. Bidang pekerjaan umum, pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) untuk rumah tigggal;
3. Bidang Perhubungan;
4. Bidang pertanahan, pemberian pelayanan melegalisir serta memproses surat pelepasan hak atas tanah di wilayahnya dan mengetahui surat pernyataan pemilikan/penguasaan tanah;
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri, dengan pelayanan pemberian penerbitan izin gangguan usaha (HO) untuk kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan kecil;
7. Bidang otonomi daerah pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian meliputi pemberian pelayanan pemungutan pendapatan daerah.

Urusan pilihan adalah urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatakan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan karakterisitik wilayah kecamatan, yang meliputi bidang:

a. Pertanian;
b. Energi dan Sumberdaya Mineral;
c. Pariwisata, pemberian izin usaha pariwisata yang dikelola oleh perseorangan;
d. Perindustrian dan Perdagangan.

Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kota Bangun Darat selama kurun waktu Tahun 2022. Terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Kota Bangun Darat, yaitu :

a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
b. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP;
c. Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan;
d. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang aktif;
e. Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan;

f. Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

g. Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik.

Tabel T-C. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kota Bangun Darat

Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2024

Perangkat Daerah : Kecamatan Kota Bangun Darat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian	Proyeksi
				2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan			N/A	82	83	84	85	82	83
2	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			N/A	100	100	100	100	100	100
3	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			N/A	100	100	100	100	100	100
4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa			N/A	5,5	6	6,5	7	5,5	6
5	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan			N/A	0	0	0	0	0	0
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			N/A	64	66	68	70	64	66
7	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP			N/A	100	100	100	100	100	100
8	Tingkat Aksebilitasi Wilayah Kecamatan			78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
9	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif			100	100	100	100	100	100	100

10	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan			0	100	100	100	100	100	100
11	Cakupan Penylnggaraan Urusan Pemerintahan Umum			0	100	100	100	100	100	100
12	Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik			42,8	57,1	71,4	71,4	85,7	57,1	71,4

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dalam pasal 126 menerangkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagaian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan juga merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati / Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kota Bangun Darat berpedoman kepada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan. Yaitu disebutkan dalam Pasal 3 bahwa Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Selanjutnya mengenai fungsi diuraikan pada pasal berikutnya yaitu di pasal 4 yang berbunyi Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya menyelenggarakan fungsi:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;

8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

a. Permasalahan dan Hambatan

Identifikasi permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Kota Bangun Darat dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan adalah:

1) Bidang Pemerintahan
   a) Belum optimalnya pembinaan aparatur desa
   b) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan
   c) Belum optimalnya penyelesaian batas wilayah dan sengketa tanah
   d) Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur kecamatan
   e) Belum optimalnya pengelolaan arsip kecamatan secara baku
   f) Beban kerja belum merata untuk semua jabatan terutama yang menangani keuangan
   g) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur kecamatan
2) Bidang Ekonomi
   a) Kondisi geografis antar wilayah dalam kecamatan yang berjauhan sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.
   b) Adanya pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat terutama di bidang ekonomi.
3) Bidang Kesra
   a) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur desa dan/atau kelurahan dalam melaksanakan/memfasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial
   b) Minimnya data dan informasi dari desa dan atau kelurahan
4) Bidang Aset Pemerintahan

Minimnya sarana dan prasarana sosial, umum, dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah

5) Bidang Pelayanan
   a) Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan PATEN
   b) Masih kurangnya kemampuan SDM dalam memberikan pelayanan PATEN sesuai SOP

b. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Atas dasar permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan Kota Bangun Darat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka menimbulkan dampak terhadap pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, antara lain:

1) Terkait dengan adanya wabah covid 19 berpengaruh dengan adanya rasionalisasi anggaran sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak bisa mencapai target yang sudah ditentukan sebelumnya.
2) Dengan adanya wabah covid 19 juga berpengaruh pada pelayanan kepada masyarakat karena harus dibatasi agar tidak menimbulkan *cluster* baru.

c. Tantangan dan Peluang

Dalam proses pencapaian tujuan terdapat tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun Darat. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Tersedianya sarana dan prasarana serta dukungan dana yang ada dapat membantu kelancaran dalam melayani dan memfasilitasi pemerintahan desa dan memperlancar kegiatan di Kecamatan.
2) Sumber Daya Manusia yang mempunyai pendidikan yang memadai dan semangat untuk belajar terhadap tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan peluang yang bisa didapatkan adalah :

1) Kepemimpinan yang mempunyai jangkauan ke depan (visioner), berkomitmen dan berintegritas menciptakan pembangunan yang inspiratif.
2) Optimalisasi ketersediaan sumber daya manusia yang ada agar sesuai dengan beban kerja berdasarkan analisis beban kerja.

d. Formulasi isu-isu penting

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat diperoleh isu-isu strategis pada Tahun 2025 yang dapat digunakan sebagai penentuan kebijakan penganggaran. Beberapa isu strategis Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2025 sebagai tugas dan fungsinya antara lain:

1) Mengadakan sosialisasi dan pembinaan kepada perangkat desa
2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya memiliki dokumen admnisistrasi kependudukan
3) Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam menangani sengketa lahan
4) Melengkapi sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur kecamatan
5) Mengikuti bimtek dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM
6) Mengusulkan pembangunan di desa melalui musrenbang
7) Melengkapi sarana dan prasarana pendukung pelayanan PATEN

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada Tahun anggaran 2025 review Rancangan RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai Lampiran.

Tabel. T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Perangkat Daerah : Kecamatan Kota Bangun Darat

No.	Rancangan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	UNSUR KEWILAYAHAN						UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	Nilai	6.956.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	Nilai	6.956.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14	dokumen	180.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14	dokumen	180.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	60.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	60.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	20.000.000	

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	20.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	20.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	20.000.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	20.000.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	20.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	20.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan	20	laporan	3.976.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan	20	laporan	3.976.000.000	

			Perangkat Daerah yang akuntabel						Perangkat Daerah yang akuntabel				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bangun Darat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43	Orang/ bulan	3.951.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bangun Darat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43	Orang/ bulan	3.951.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	10.000.000	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	Laporan	15.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	500	unit	50.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	500	unit	50.000.000	
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13	Laporan	50.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13	Laporan	50.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan	10	orang	450.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan	10	orang	450.000.000	

			Administrasi Kepegawaian						Administrasi Kepegawaian				
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	Paket	350.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	Paket	350.000.000	
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bangun Darat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bangun Darat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang	100.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	24	Unit	815.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	24	Unit	815.000.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga Bangunan Kantor yang Disediakan	20	Unit	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga Bangunan Kantor yang Disediakan	20	Unit	20.000.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13	Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13	Paket	50.000.000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	50.000.000	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	80.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	80.000.000	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	15.000.000	

8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	50.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	50.000.000	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	500.000.000	
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500	Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500	Dokumen	50.000.000	
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	16	unit	550.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	16	unit	550.000.000	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bangun Darat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	550.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lanpangan	Kota Bangun Darat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	550.000.000	
9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bangun Darat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bangun Darat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	bulan	815.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	bulan	815.000.000	

1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	15.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	15.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	500.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	500.000.000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	300.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	300.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	14	unit	120.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	14	unit	120.000.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bangun Darat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13	Unit	300.000.000	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bangun Darat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13	Unit	300.000.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bangun Darat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	Unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bangun Darat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	Unit	100.000.000	
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bangun Darat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bangun Darat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	20.000.000	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	Persen	22.910.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	Persen	22.910.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	25	kegiatan	22.910.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	25	kegiatan	22.910.000.000	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4	Laporan	110.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4	Laporan	110.000.000	
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	112	Laporan	22.800.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	112	Laporan	22.800.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	Persen	868.500.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	Persen	868.500.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	12	Kali	868.500.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	12	Kali	868.500.000	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kota Bangun Darat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3	Lembaga	50.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kota Bangun Darat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3	Lembaga	50.000.000	

3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	Laporan	818.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	Laporan	818.500.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	Persen	475.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	Persen	475.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	1	Kegiatan	475.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	1	Kegiatan	475.000.000	
4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Bangun Darat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5	kegiatan	450.000.000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Bangun Darat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5	kegiatan	450.000.000	
8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Dokumen	25.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Dokumen	25.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	40.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	40.000.000	

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Desa Yang difasilitasi	10	Desa	40.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Desa Yang difasilitasi	10	Desa	40.000.000	
3	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10	Dokumen	25.000.000	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10	Dokumen	25.000.000	
6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2	Desa	15.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2	Desa	15.000.000	
						31.249.500.000						31.249.500.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan uu nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan uu nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diwajibkan bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Akhir Pemerintah Daerah (RKPD).

Setiap penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW, Kelurahan, kecamatan sampai kabupaten.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD yang menitikberatkan pada sinkronisasi Rencana Kerja Akhir antar SKPD dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat agara tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan.

Kegiatan musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya didalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi seperti ini pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil-hasil pembangunan partisipatif.

Tahapan musrenbang dapat diskriptifkan fungsi dan perencanaan serta kerangka waktu masing-masing tahapan musrenbang :

1. Musrenbang tingkat kelurahan adalah tahapan penentuan prioritas usulan program/kegiatan dari masing-masing RT/RW serta pengklasifikasian usulan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
2. Musrenbang tingkat kecamatan adalah tahapan pemantapan usulan program/kegiatan yang akana disampaikan pada forum SKPD. Pada tahap ini peranan SKPD sangat besar dalam

membantu masyarakat memfoumulasikan usulan program/kegaiatan mereka.;

3. Forum SKPD adalah tahapan sinkronisasi usulan program/kegiatan SKPD dengan usulan masyarakat hasil usulan musrenbang kecamatan. Pada tahap ini usulan-usulan program/kegaiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD sesuai misi dalam RPJMD. Minggu II s/d minggu IV bulan Februari);
4. Musrenbang tingkat kabupaten adalah puncak dari pelaksanaan musrenbang di kabupaten ini adalah tahapan finalisasi usulan program/kegiatan dari masyarakat yang akan diimplementasikan oleh masing-masing SKPD terkait.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Nama Paket	Wilayah	Target	Pagu	Tematiks	Keterangan
1	Pembangunan Dan Pengerasan Jalan Usaha Tani RT 001 Suka Bumi, Kab. Kutai Kartanegara	Kota Bangun Darat	1	200.000.000,00	Musrenbang_KEC	
2	Pembangunan Dan Pengerasan Jalan Usaha Tani RT 002 Desa Suka Bumi, Kab. Kutai Kartanegara	Kota Bangun Darat	1	200.000.000,00	Musrenbang_KEC	
3	Pembangunan Dan Pengerasan Jalan Usaha Tani RT 007 Desa Suka Bumi, Kab. Kutai Kartanegara	Kota Bangun Darat	1	200.000.000,00	Musrenbang_KEC	
4	Pembangunan dan Perbaikan MCK Umum/Komunal Kecamatan Kota Bangun DaratKota Bangun II	Kota Bangun Darat	1	200.000.000,00	Musrenbang_KEC	
5	Pembangunan dan Perbaikan MCK Umum/Komunal Kecamatan Kota Bangun Darat Kota Bangun III	Kota Bangun Darat	1	200.000.000,00	Musrenbang_KEC	
6	Pembangunan Drainase Jalan Lingkungan RT 008 Desa Suka Bumi, Kab. Kutai Kartanegara	Kota Bangun Darat	1	200.000.000,00	Musrenbang_KEC	
7	Pembangunan Gedung Karang Taruna Desa Suka Bumi , Kab. Kutai Kartanegara	Kota Bangun Darat	1	200.000.000,00	Musrenbang_KEC	
8	Semenisasi parit lingkungan RT 11. RW 2 desa sari nadi, Kab. Kutai Kartanegara	Kota Bangun Darat	1	210.192.800,00	Pokir	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAEAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 – 2026 merupakan dokumen rencana pembanguan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembanguan nasional sebagai mana diatur dalam undang-undang nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 – 2026 merupakan RPJMD Keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 – 2025. Oleh sebab itu penyusunana RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara masa bakti Tahun 2021 – 2026, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 -2025 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang RPJPD.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 – 2026 memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima Tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daearah (RPJMD) merupakan dok perencanaan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahunan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, RPJMD merupakan Penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati dan arah kebijakan keuangan daerah.

RPJMD tersebut digunakan sebagai pedomam dalam Penyusunan RPKD, yang merupakan Rencana Pembangunan Tahunan daerah, serta memuat prioritas pembanguan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal , serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di kabupaten Kutai Kartanegara, maka Visi yang hendak dicapai dalan Priode 2022 – 2026 adalah :

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Akhir Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dijabarkan kembali kedalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkam dalam Renja Akhir Kecamatan. Maka untuk itu Tujuan strategis Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel"

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kurtai Kartanegara Tahun 2024 adalah :

"Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan"

Tabel 3.1

Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel		Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan

BAB IV
RENCANA KERJA AKHIR DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Kota Bangun Darat merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (PD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Kota Bangun Darat sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
    1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah.

       Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Kota Bangun Darat diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara terpilih nantinya. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Akhir Kecamatan Kota Bangun Darat merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih nantinya.
    2. Pencapaian SDGs.
    3. Pengentasan kemiskinan.
    4. Pencapaian SPM.
    5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegitan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:

1. Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan.

   Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2024 adalah 5 Program dengan 12 Kegiatan dan 44 sub kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan.

   Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kota Bangun Darat sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat dan melingkupi semua Desa.

3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

   Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Renja Akhir Kecamatan Kota Bangun Darat sebesar Rp. 13.421.746.888,00.

c. Tabel rencana program dan kegiatan sebagaimana format table berikut ini:

Tabel. T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Perangkat Daerah : Kecamatan Kota Bangun Darat

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
						Kecamatan Kota Bangun Darat			9.244.051.823,00				9.244.051.823,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			9.244.051.823,00				9.244.051.823,00	
	7	01				KECAMATAN			9.244.051.823,00				9.244.051.823,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.197.509.023,00			-	5.197.509.023,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	605.000.000,00			-	605.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	140.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	3 Dokumen	140.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	4 Laporan	70.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

										Kel/Desa				
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Laporan	60.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah								
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa	200 Data	300.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA	200 Data	300.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

							Lingkup Perangkat Daerah				BAGI HASIL			
	7	01	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Berita Acara	25.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	25 Berita Acara	25.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.269.009.023,00			-	3.269.009.023,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	3.169.009.023,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	43 Orang/bulan	3.169.009.023,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

										Darat, Semua Kel/Desa				
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	-	2 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	12 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Dokumen	25.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	275.000.000,00			-	275.000.000,00	
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								

							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Dokumen	25.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Dokumen	150.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

	7	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD								
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	12 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

										Kel/Desa				
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	30.000.000,00			-	30.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	62 Paket	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	62 Paket	30.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	235.000.000,00			-	235.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	10 Paket	25.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	3 Paket	10.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Paket	15.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Paket	25.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

										Kel/Desa				
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	12 Laporan	125.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	12 Dokumen	25.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

	7	0 1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	80.000.000,00			-	80.000.000,00	
	7	0 1	01	2.07	000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Unit	80.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	0 1	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	551.000.000,00			-	551.000.000,00	
	7	0 1	01	2.08	000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

										Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa				
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	12 Laporan	300.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	12 Laporan	250.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	152.500.000,00			-	152.500.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat,	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	13 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

										Semua Kel/Desa				
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	13 Unit	100.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	2.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Unit	2.500.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	3.045.542.800,00			-	3.045.542.800,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	400.000.000,00			-	400.000.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								

							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2 Laporan	150.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Dokumen	250.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	100.000.000,00			-	100.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2 Laporan	100.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	2.545.542.800,00			-	2.545.542.800,00	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan								

							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	935.350.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	4 Laporan	935.350.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	1.610.192.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	8 Laporan	1.610.192.800,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

										Kel/Desa				
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	486.000.000,00			-	486.000.000,00	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	486.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	5 Lembaga Kemasyarakatan	486.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	175.000.000,00			-	175.000.000,00	

	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	175.000.000,00			-	175.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	175.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	2 Laporan	175.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	225.000.000,00			-	225.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	225.000.000,00			-	225.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional								

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	50 Orang	200.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	3 Dokumen	25.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	15.000.000,00			-	15.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	15.000.000,00			-	15.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa								
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	4 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	J U M L A H								9.244.051.823,00				9.244.051.823,00	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Akhir (RANHIR) Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kota Bangun Induk Tahun 2022-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Akhir (RANHIR) Kecamatan Kota Bangun Darat yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat. Renja Akhir sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Kota Bangun Darat di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu Tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

   1. Kecamatan Kota Bangun Darat berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Akhir (RANHIR) Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.
   2. Kecamatan Kota Bangun Darat berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Akhir dan Anggaran (RKA) Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja Akhir Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.
   3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Akhir Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2025.

C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Akhir (RANHIR) Kecamatan Kota Bangun Darat selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Kota Bangun Darat. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Akhir Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Akhir Kecamatan Kota Bangun Darat juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa yang datang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan Rencana Kerja Akhir (RANHIR) Kecamatan Kota Bangun Darat ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Kota Bangun Darat serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana tindak lanjut ini dirancang untuk memastikan implementasi yang efektif dan efisien dari Rencana Kerja Akhir (RANHIR) Kecamatan Kota Bangun Darat, serta untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terpenuhi dengan baik.

Demikian Rancangan Rencana Kerja Akhir Kecamatan Kota Bangun Darat. Diharapkan dengan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Akhir Kecamatan Kota Bangun Darat ini, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Kota Bangun Darat dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

ggg.RENJA TAHUN 2025 KECAMATAN SAMBOJA BARAT

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya berupa dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samboja Barat dipakai sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Samboja Barat yang selanjutnya akan dipakai sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Samboja Barat. Muatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

Rencana Kerja Kecamatan Samboja Barat Tahun 2025 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu, b) Rumusan status kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini, c) Rumusan peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan Renja, d) Rumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan, e) pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana, f) rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja, g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan, h) prakiraan maju pendanaan untuk tahun berikutnya, i)

kejelasan siapayang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktupenyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran. Melalu pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan kerangka berfikir yang komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan melalui:

a. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan;
b. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur Pemerintah dan non pemerintah;
c. keterwakilan yang mewadai dari seluruh segmen masyarakat terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal;
d. berperan aktif pada pelaksanaan musrenbang RKPD dari segi penerapan perencanaan partisipatif, e)Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan serta prioritasprogram.

Pendekatan politis, penyusunan Renja Kecamatan Samboja Barat mengacu pada RKPD dan RPJMD yang merupakan bentuk konsekuensi politis antara Bupati/Wakil Bupati terpilih. Pendekatan ini juga tercermin pada keterlibatan aktif DPRD dalam musrenbang Kecamatan dan kabupaten termasuk hasil sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD, kemudian dokumen RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan sampai RAPBD.

Pendekatan top down, perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui rapat koordinasi dan musrenbang mulai tingkat nasional, provinsi dan kabupaten juga tujuan *globalMDGs*. Pendekatan ini tercermin pada

a. sinergi dengan program prioritas nasionaldan daerah;
b. konsisten pada RPJMD, RKPD dan Renstra Kecamatan Samboja Barat, Konsisten dengan dokumen RTRW daerah;
c. penanganan masalah dengan pendekatan holistic dan pendekatan sistem.

Pendekatan *bottom-up,* perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dan diselaraskan melalui musrenbang, konsisten terhadap visi misi

RPJMD serta kesepakatan masyarakat tentang prioritas pembangunan dan hasil forum SKPD.

Penyusunan Renja ini disesuaikan dengan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, PengendalianDan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja ini memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kecamatan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Samboja Barat;
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Samboja Barat.

1.3.2 Tujuan

1. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Samboja Barat Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025;
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Samboja Barat dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Samboja Barat Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD dan Renstra PerangkatDaerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN
- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN SAMBOJA BARAT TAHUN LALU

Penyusunan dan Pelaksanaan Renja mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan serta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Adapun tugas pokok dan fungsi dari Kantor Kecamatan Samboja Barat adalah:

A. Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Fungsi Utama

1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasiltas pelayanan umum;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
10. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
11. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan, pengkoordinasi integrasi dan sinkronisasi kegiatan - kegiatan lain di lingkungan Kecamatan;

12. Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan serta Lembaga Kemasyarakatan.

C. Indikator Kinerja Utama

Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan oleh Kecamatan Samboja Barat adalah pengkuruan dalam bentuk indeks berskala 1 s.d 10 yang merupakan rata-rata kumulatif capaian indikator pada 10 (Sepuluh) sasaran strategis pada persepektif pemangku kepentingan. Semakin tinggi nilai tingkat keberhasilan, menunjukkan bahwa semakin baik kinerja Kecamatan Samboja Barat secara keseluruhan perspektif pemangku kepentingan.

Adapun capaian atas Indikator Keberhasilan atau IKU (Indikator Kinerja Utama) ini pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen		75	75	75	75
		Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen		80	80	80	80
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai		100	100	100	100
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen		100	75	75	75

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program/kegiatan, dikarenakan ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi serta perencanaan penganggaran biaya yang belum sesuai kebutuhan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Samboja Barat tidak efektif dan efisiennya penggunaan anggaran dikarenakan perencanaan dan penganggaran yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi mengakibatkan tujuan dan sasaran tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya

Untuk tahun berikutnya perencanaan dan penganggaran perlu di seduaikan dengan kebutuhan yang sangat mendesak sehingga Anggaran dapat di relisasikan sesuai dengan target. dan diperlukan komitmen pimpinan dalam mengarahkan tim penyusunan program dan kegiatan dan bersama –sama dengan seksi yang lain.

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra

Kecamatan Samboja Barat baru menyusun rencana kerja per September 2024 sehingga belum ada realisasi kegiatan.

TC- 29

Kecamatan : Samboja Barat

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Kutai Kartanegara

KODE					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
										Target Renja tahun (2023)	Realisasi Renja tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	75	0	0	0	0,0%	75	75	100%
						Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	Persen	100	0	0	0	0,0%	100	100	100%
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%

7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kali	0	0	0	0	0%	0	0	0%
					Vertikal Terkait										
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	SPM	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	kegiatan	1	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kali	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kali	0	0	0	0	0%	0	0	0%

7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	150	0	150	21	14%	150	255	170%
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Berkas	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Berkas	1	0	1	1	100%	1	2	200%
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	72,7	0	72,7	72,7	100%	72,7	72,7	100%
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	0	0	0	0	0	0	0	0%
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0%

7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	80	0	80	70	87,50%	80	150	187,5%
7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan	1	0	1	1	18,57%	1	1	110,00%
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	159	0	159	159	100%	159	318	200%
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Lembaga	132	0	132	132	100%	132	264	200%
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	470	0	467	448	100%	410	858	182%
7	01	03	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Orang	132	0	132	132	100%	132	264	200%
7	1	3	203	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	1	3	203	3	Penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	264	0	264	264	100%	264	528	200%

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	persen	100	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kegiatan	0	0	N/A	0	0%	0	0	0%

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	0	83,33	0	0%	0%	0	0%
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	11	0	11	0	0%	11	0	0%
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%

7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kegiatan	5	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kali	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
X	XX	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77	0	80	0	0%	65	65	84,41%
X	XX	01.	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	3	0	4	4	100%	3	7	233%
X	XX	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	1	0	2	2	100%	1	3	300%

X	XX	01.	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	2	0	2	2	100%	2	4	200%
X	XX	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	laporan	21	0	21			21		
X	XX	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	70	70	70	70	100%	70	140	200%
X	XX	01.	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	0	1	0	0%	1	1	100%
X	XX	01.	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	20	0	20	20	100%	20	40	200%
X	XX	01.	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	dokumen	6	0	6	6	100%	6	12	200%
X	XX	01.	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	6	0	6	6	100%	6	12	200%
X	XX	01.	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	dokumen	20	0	20	6	300%	20	26	130%

X	XX	01.	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Stel/Unit	70	0	70	70	100%	70	140	200%
X	XX	01.	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	20	0	20	0	0%	20	20	100%
X	XX	01.	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	jenis	6	0	6	6	100%	6	12	200%
X	XX	01.	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	unit	68	0	68	68	100%	68	136	200%
X	XX	01.	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Unit	3769	0	3769	3769	100%	3769	7438	200%
X	XX	01.	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	unit	141	0	141	141	100%	141	282	200%
X	XX	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	1737	0	1737	1737	100%	1737	3474	200%
X	XX	01.	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	6	0	6	6	100%	6	12	200%
X	XX	01.	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat	230	0	230	230	100%	230	460	200%
X	XX	01.	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	96	0	96	96	100%	96	192	200%
X	XX	01.	2,07	05	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	2	0	2	2	100%	2	4	200%
X	XX	01.	2,07	07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1	0	1	1	100%	1	2	200%

X	XX	01.	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12	0	12	12	100%	12	24	200%
X	XX	01.	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	0	12	12	100%	12	24	200%
X	XX	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	12	0	12	12	100%	12	24	200%
X	XX	01.	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	bulan	12	0	12	12	100%	12	24	200%
X	XX	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	unit	150	0	150	100	67%	100	200	133%
X	XX	01.	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	0	0	0	0	0%	0	0	0%
X	XX	01.	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	4	0	4	4	75%	4	8	135%
X	XX	01.	2.09	09	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	4	0	4	4	100%	4	4	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagaian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Samboja Barat namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Samboja Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar.
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat.
3. Pelayanan yang bersifat penyedian data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Kelurahan dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Samboja Barat selama kurun waktu tahun 2021 – 2026, yakni ada 4 Indikator Kinerja Utama

1. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP
3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan
4. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa

Lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Samboja Barat, dapat dilihat pada tabel 2.2 / Tabel T-C.30 dibawah ini :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			0	75	75	75	75	0	0	75	75	Untuk Tahun 2024 masih berjalan
2	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP			0	80	80	80	80	0	0	80	80	
3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan			0	100	100	100	100	0	0	100	100	
4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa			0	75	75	75	75	0	0	75	75	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

1. Permasalahan

Permasalahan Kecamatan Samboja Barat dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemahnya/belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan dan keamanan wilayah yang disebabkan :

a. Kualitas SDM yang belum memadai;
b. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
c. Terbatasnya Anggaran Pembangunan Skala Kecil Kecamatan;
d. Belum optimalnya peran Masyarakat dalam pembangunan.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Samboja Barat secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Bidang Pemerintahan:

Urusan Kependudukan memiliki permasalahan :

a) Bahwa masih banyak warga yang belum melakukan Perekaman KTP-eL;
b) Masih banyak warga yang mutasi atau pindah tidak melapor sehingga kevalidan data penduduk sulit di capai, dan tidak terdata sebagai penduduk setempat.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selalu menyampaikan akan pentingnya hal tersebut, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan warga sudah mempunyai KK dan KTP Elektronik.

Pembinaan Perangkat memiliki Permasalahan:

a. Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Aparatur Kelurahan serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;

b. Sistim administrasi Kependudukan dan urusan Pemerintahan belum tercapai dengan baik sehingga perlu adanya pembenahan pada teknis data penduduk.

Upaya yang telah dilakukan*:*

a. Perlu pelatihan peningkatan kapasitas SDM aparatur di Kecamatan;
b. Anggaran untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi belum maksimal penganggarannya;

B. Bidang Pertanahan Dan Aset, Permasalahan:

a. Masih Banyak Kasus-kasus tumpang tindih kepemilikan tanah sehingga menimbulkan konflik.
b. Banyaknya Tanah yang masuk wilayah Tahura, Tanah milik Perusahaan, sehingga masyarakat banyak menuntut atas tanah tersebut untuk di buatkan Surat atas Tanah tersebut
c. Banyak Masyarakat yang memiliki SKPT bukan penduduk setempat sehingga bilamana ada pembuatan Surat atas tanah yang berbatasan dengan warga tersebut akan menjadi kendala dalam proses pembuatan Surat Tanah.

C. Bidang Ekonomi Pembangunan & Pemberdayaan Perempuan,

Permasalahan *:*

a. Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang masih belum direalisasi;
b. Minimnya sosialisasi dari Stake Holder yang membidangi baik dari pemerintah maupundari lembaga lain;
c. Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Upaya yang telah dilakukan:

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat dan lembaga - lembaga yang berada di tingkat Desa atau Kelurahan maupun kecamatan dengan stake holder atau dinas terkait dan pihak swasta yang ada diwilayah Kecamatan Samboja Barat.

D. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan :

a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
b. Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
c. Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi diKecamatan Samboja Barat.

Upaya yang telah dilakukan :

Meningkatkan peran serta Lembaga dengan Organisasi Kepemudaan di Samboja Barat agar lebih maksimal agar lebih baik kedepannya.

E. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat, Permasalahan:

a. Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
b. Masih tingginya penggunaan Miras dan Narkoba;

Rekomendasi :

Mengadakan rapat pembinaan Linmas dan Koordinasi satgas yang lain, untuk meningkatkan SDM agar memahami tentang hak dan kewajiban dan dapat melindungi masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025

Review rancangan awal RKPD Kecamatan Samboja Barat adalah perbandingan antara program/kegiatan yang tertuang ke dalam rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan SKPD atau adanya program kegiatan yang tidak sesuai dengan tupoksi SKPD.

Review secara rinci dapat disampaikan sebagaimana dalam Tabel TC. 31 dibawah ini :

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Samboja Barat

No	Rancangan Awal RKPD						Rancangan Akhir RKPD					
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						42,158,044,152						46,402,470,923
7.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec Samboja Barat**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**	**68**	**14,223,248,247**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kec Samboja Barat**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**	**70**	**19,019,200,173**
7.1.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec Samboja Barat**	**Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**dokumen**	**3**	250,000,000	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**Kec Samboja Barat**	**Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**dokumen**	**3**	605,000,000
							Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec Samboja Barat	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	dokumen	2	300,000,000
							Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen	Kec Samboja Barat	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	laporan	2	25,000,000
7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Samboja Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	100,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Samboja Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	140,000,000
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec Samboja Barat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	2	5,000,000
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec Samboja Barat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	2	5,000,000
7.1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Samboja Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1	150,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Samboja Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	2	70,000,000
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Samboja Barat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	2	60,000,000
7.1.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec Samboja Barat**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**laporan**	**13**	9,796,538,650	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec Samboja Barat**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**laporan**	**7**	12,409,272,576
7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Samboja Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	168	9,302,538,650	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Samboja Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	75	11,915,272,576
7.1.1.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Samboja Barat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Samboja Barat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	25,000,000
7.1.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec Samboja Barat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12	444,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec Samboja Barat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	5	444,000,000
							Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					25,000,000

7.1.1.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kec Samboja Barat**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan**	**unit**	**1030**	40,800,000	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kec Samboja Barat**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan**	**unit**	**1030**	265,800,000
							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					25,000,000
							Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					150,000,000
							Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					50,000,000
7.1.1.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec Samboja Barat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	**1**	40,800,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec Samboja Barat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	**2**	40,800,000
7.1.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec Samboja Barat**	**Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**orang**	**27**	196,730,000	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec Samboja Barat**	**Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**orang**	**23**	322,494,000
7.1.1.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec Samboja Barat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	146,730,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec Samboja Barat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	34	272,494,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec Samboja Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	27	50,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec Samboja Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	20	50,000,000
7.1.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec Samboja Barat**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia**	**Layanan**	**6**	1,106,003,000	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec Samboja Barat**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang**	**Layanan**	**6**	1,921,289,000
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Samboja Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	162	19,659,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Samboja Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	59	38,497,000
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Samboja Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	367	144,170,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Samboja Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	107	380,422,000
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Samboja Barat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	25	16,457,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Samboja Barat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20	16,457,000
7.1.1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Samboja Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	120,605,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Samboja Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	202	256,190,000
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Samboja Barat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	268	40,812,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Samboja Barat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	79	311,563,000
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Samboja Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1655	764,300,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Samboja Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	718	918,160,000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec Samboja Barat				-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec Samboja Barat				-
7.1.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec Samboja Barat**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang**	**Unit**	**96**	415,179,000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec Samboja Barat**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang**	**unit**	**52**	481,808,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Samboja Barat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Samboja Barat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	1	-
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec Samboja Barat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	60,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec Samboja Barat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	60,000,000
7.1.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Samboja Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit		355,179,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Samboja Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	51	421,808,000
7.1.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec Samboja Barat**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang**	**bulan**	**12**	2,118,378,597	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec Samboja Barat**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang**	**bulan**	**12**	2,131,077,597
7.1.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Samboja Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3212	33,749,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Samboja Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1584	46,448,000
7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Samboja Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	676,598,777	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Samboja Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	676,598,777
7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Samboja Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1,408,030,820	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Samboja Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1,408,030,820

7.1.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec Samboja Barat**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang**	**unit**	**150**	289,619,000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec Samboja Barat**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang**	**unit**	**150**	372,459,000
7.1.12.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Samboja Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	8	60,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Samboja Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	8	50,000,000
7.1.12.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kec Samboja Barat**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	133	43,219,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kec Samboja Barat**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	85	62,059,000
7.1.12.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Samboja Barat	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	8	136,400,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Samboja Barat	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	210,400,000
7.1.12.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Samboja Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Samboja Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			50,000,000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kec Samboja Barat**						**Kec Samboja Barat**				500,000,000
							Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan					150,000,000
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					350,000,000
7.1.2.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kec Samboja Barat**				10,000,000		**Kec Samboja Barat**				10,000,000
7.1.2.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec Samboja Barat				10,000,000		Kec Samboja Barat				10,000,000
7.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec Samboja Barat**	**Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP**	**Persen**	**75**	**40,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec Samboja Barat**	**Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP**	**Persen**	**75**	**817,870,750**
			Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	**Persen**	**100**	**7,000,000,000**			**Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan**	**Persen**	**100**	**5,600,000,000**
7.1.2.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kec Samboja Barat**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat**	**Kegiatan**	**150**	7,040,000,000	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kec Samboja Barat**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat**	**Kegiatan**	**150**	6,417,870,750
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					
7.1.2.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec Samboja Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	400	40,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec Samboja Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	817,870,750
7.1.2.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	149	7,000,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	97	5,600,000,000
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**	**Kec Samboja Barat**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif**	**Persen**	**75**	**20,894,795,905**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**	**Kec Samboja Barat**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif**	**Persen**	**727**	**20,965,400,000**
7.1.3.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec Samboja Barat**				831,315,000	**Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec Samboja Barat**				110,000,000
7.1.3.2.0101	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec Samboja Barat				85,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec Samboja Barat				85,000,000
7.1.3.2.0103	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Samboja Barat				746,315,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Samboja Barat				25,000,000

7.1.3.2.06	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kec Samboja Barat**	**Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan**	**Kegiatan**	**80**	13,968,080,905	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kec Samboja Barat**	**Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan**	**Kegiatan**	**80**	6,875,000,000
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kec Samboja Barat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	750	5,000,000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kec Samboja Barat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	95	55,000,000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Samboja Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	159	6,624,989,905	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Samboja Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	93	4,050,000,000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Samboja Barat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Orang/Unit	356	7,318,091,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Samboja Barat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Orang/Unit	159	2,700,000,000
	Evaluasi Kelurahan	Kec Samboja Barat	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	4	20,000,000	Evaluasi Kelurahan	Kec Samboja Barat	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	2	70,000,000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kec Samboja Barat**	**Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan**	**Kali**	**470**	6,095,400,000	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kec Samboja Barat**	**Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan**	**Kali**	**41**	13,805,400,000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Samboja Barat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	**467**	5,995,400,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Samboja Barat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	**41**	13,605,400,000
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec Samboja Barat				50,000,000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec Samboja Barat				50,000,000
	Penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec Samboja Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	3	50,000,000	Penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec Samboja Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit	2	150,000,000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	**Kec Samboja Barat**					**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan**	**Kec Samboja Barat**				175,000,000
							Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					175,000,000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Kec Samboja Barat**						**Kec Samboja Barat**				**0**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	**Kec Samboja Barat**						**Kec Samboja Barat**				**0**
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah*****)**	**Kec Samboja Barat**						**Kec Samboja Barat**				**0**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kec Samboja Barat**						**Kec Samboja Barat**				-
							Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan					
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	**Kec Samboja Barat**				-		**Kec Samboja Barat**				-
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Samboja Barat						Kec Samboja Barat				
7.1.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec Samboja Barat**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec Samboja Barat**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase**	**7145**	200,000,000
7.1.5.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec Samboja Barat**	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala**	**Kec Samboja Barat**	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan**	**Kegiatan**	**5**	**200,000,000**
7.1.5.2.014	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec Samboja Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec Samboja Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	1103	200,000,000
	JUMLAH					**42,158,044,152**	**JUMLAH**					**46,602,470,923**

Berdasarkan hasil analisis terhadap rancangan RKPD Kecamatan Samboja Barat, terdapat Koreksi pada beberapa kegiatan sehingga mengalami perubahan dan berdampak pada penambahan maupun pengurangan anggaran, sebagai akibat dari penyesuaian terhadap beberapa kebijakan, maupun urgensi dari kegiatan itu sendiri.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Renja Kecamatan Samboja Barat Kabuaten Kutai Kartanegara memberi ruang untuk mengakomodir Usulan dari para pemangku kepentingan, seperti masyarakat secara langsung maupun melalui badan legislatif (angota DPRD), LSM, Akademisi, maupun lintas OPD melalui mekanisme Musrenbang, baik pada tingkat Desa selanjutnya didiskusikan dalam pembahasan Musrenbang, forum OPD Kabupaten maupun Musrenbang Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan usulan dari hasil musrenbang OPD kabupaten di tingkat Kecamatan. Usulan para pemangku kepentingan ini, masih sejalan dengan isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Muara Kaman maupun Perangkat Daerah lain yang terkait, seperti yang tercermin pada Program dan Kegiatan dalam Dokumen Renstra Kecamatan Muara Kaman Kutai Kartanegara 2021-2026.

Kesesuaian usulan pemangku kepentingan dengan program kerja dari Kecamatan Muara Kaman tidak terlepas dari adanya proses pelaksanaan kegiatan Musrenbang baik tingkat Desa, Kecamatan maupun pada Kabupaten yang berjalan sangat baik. Beberapa masukan dan usulan dari para pemangku kepentingan terhadap Kecamatan Muara Kaman Kutai Kartanegara, disampikan dalam table TC.32 di bawah.

TC. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kecamtan Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	Jl Poros amborawang laut rt 01 kel. Amborawang laut, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Terjadinya longsor pada pinggir parit saat hujan
2	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	Jl KH Dewantara RT 02 Kel. Amborawang Laut, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Terjadinya longgor di pinggir parit saat hujan
3	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl Pattimura RT 03 Kel. Amborawang Laut, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan kurang maksimal
4	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	JL KH Agus Salim Ke Andi Sindrang RT 04 Kel. Amborawang Laut, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Terjadinya longsor di pinggir parit saat hujan
5	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl Sulawesi Gang Family RT 05 Kel. Amborawang Laut, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan kurang maksimal
6	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	Jl Taman Bahagia RT 06 Kel. Amborawang Laut, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Terjadinya longsor di pinggir parit saat hujan
7	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	Jl Banyuwangi RT 07 Kel. Amborawang Laut, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Terjadinya longsor di pinggir parit saat hujan

8	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	Jl Andi Sindrang RT 08 Kel. Amborawng Laut, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Terjadinya longsor di pinggir parit saat hujan
9	Pembangunan gedung perpustakaan desa/Kelurahan	Jl Soekarno Hatta KM 28 Rt. 03 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Belum Adanya Bangunan Gedung Perpustakaan Di SD 034 Kelurahan Karya Merdeka
10	Belanja Hibah Lembaga Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Jl Soekarno Hatta KM 35 RT 14 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Belum Adanya Rumah Ibadah/ Mushollah Di SMP Merdeka
11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Rambu, Marka, ZOSS (Zona Selamat Sekolah) dan Paku Marka)	Kelurahan Karya Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	belum adanya pagar di Tk Karya Merdeka
12	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Jl Marga Asri Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	LANJUTAN SEMENISASI JL. MARGA ASRI
13	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	JL. WIJAYA KM.28 RT.03 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	SEMENISASI JALAN LANJUTAN
14	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	RT 05 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	PENINGKATAN BADAN JL. M. AMIN
15	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl Soekarno Hatta KM 29 RT 07 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Parit Pasang Batu
16	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	JL soekarno Hatta KM 29 RT 06 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Semenisasi/ peningkatan Badan Jalan
17	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	jl Soekarno Hatta Km 30 Rt 08 Kelurahan karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Semensasi Lanjutan JL. Hasanuddin
18	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Jl Soekarno Hatta KM 30 RT 09 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Lanjutan Semenisasi Kelurahan Karya Merdeka RT 09
19	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Jl Soekarno Hatta km 31 Rt 09, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	PENINGKATAN BADAN JALAN KEBUN SAWIT
20	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	jl soekarno hatta km 31 Rt 12 kelurahan karya merdeka kecamatan samboja barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	PEMBUATAN JEMBATAN JL. AT-TAQWA RT.12
21	Pemeliharaan Penerangan Bangunan di Kecamatan Samboja Barat	Jl. S. Hatta Km.35 RT.14 kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadan penerangan lampu
22	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Jl Soekarno Hatta Km 35 Rt 15 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	SEMENISASI JALAN KELOMPOK TANI
23	Pemeliharaan Penerangan Bangunan di Kecamatan Samboja Barat	jalan poros manunggal 9, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	tidak adanya Lampu penerangan jalan kampung
24	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Rt 17 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	semenisasi
25	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	RT 18 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	semenisasi jalan
26	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	RT 20 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Turap Kanan Kiri Beserta Tanah Timbunan
27	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	RT 21 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Badan Jalan di Gang Amin
28	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	RT 26 Kelurahan Karya Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	SEMENISASI JL. PEPAYA
29	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	RT 27 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Lanjutan Semenisasi Jl. Kelompok Tani Makmur
30	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	RT 29 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	SEMENISASI JALAN GANG AL-HIJRAH
31	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	RT 31 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	SEMENISASI JALAN
32	Pemeliharaan Penerangan Bangunan di Kecamatan Samboja Barat	Jl Soekarno Hatta KM 35 RT 16 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	tidak adanya Lampu penerangan jalan kampung
33	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	RT 22 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	pemasangan turap
34	Pemeliharaan Penerangan Bangunan di Kecamatan Samboja Barat	jl Soekarno Hatta KM 25 RT 01 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	penerangan lampu jalan gang RT 1 - 15
35	Pemeliharaan Penerangan Bangunan di Kecamatan Samboja Barat	Jl Soekarno Hatta KM 35 Sampai Dengan Km 25 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Penerangan Lampu Jalan Di beberapa Gang Di Rt 1 Sampai RT 31
36	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	jl poros amborawang laut rt 01, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	terjadinya banjir saat hujan deras
37	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	Jln poros amborawang laut rt 01, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	ternjadinya longsor di pinggir parit saat hujan

38	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl poros amborawang laut rt 01, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jalan kurang maksimal
39	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl Poros Amborawang laut rt 01, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jalan kurang maksimal
40	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	jl poros amborawang laut rt 01, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	tersumbatnya saluran air
41	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	jln poros ambarawang laut rt 01, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	terputusnya penghubung jalan
42	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	jalan poros ambarawang laut rt 01, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	terkikis pinggir parit saat hujan
43	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	jl KH Dewantara rt 02, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	tersumbatnya saluran air
44	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	jl perikanan rt 02, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	tersumbatnya pembuangan air
45	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	jl pondok putih rt 02, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	terjadinya luapan air ketika hujan
46	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	jl KH Dewantara gang taman sari rt 02, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jalan kurang maksimal untuk dilewati
47	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl KH Dewantara rt 02, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jalan kurang maksimal untuk di lewati
48	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl Pariwisata RT 02, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jalan rusak dan belum maksimal
49	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl Pariwisata rt 02, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Kondisi jembatan tidak maksimal
50	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	jl Pattimura rt 03, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tersumbatnya saluran air
51	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Jl Pattimura rt 03, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jalan kurang maksimal
52	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	jl Pattimura rt 03, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	terputusnya jalan
53	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	jl Pattimura rt 03, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	terputusnya jalan penghubung
54	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	jln pattimura gunung panjang rt 03, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	terjadinya longsor pada parit
55	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Jalan Elisa Barur RT. 006 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Kondisi Jalan masih tanah dan menanjak Jika hujan sangat licin
56	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	jl pattimura gunung panjang rt 03, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jalan belum maksimal di lewati
57	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Jalan Care 2 RT. 006 Kel. Amborawang Darat Kec. samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Kondisi Jalan masih tanah dan menanjak Jika hujan sangat licin
58	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Jl sri rejeki rt 05, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jalan belum layak dilewati
59	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	jl sulawesi gang rahmat 3 rt 05, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan belum maksimal di lewati
60	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Jalan Mawar RT. 006 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Kondisi Jalan masih tanah dan bebatuan Jika hujan sangat licin
61	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Jalan Elai RT. 006 Kel. Amborawang Darat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Kondisi Jalan masih tanah dan menanjak Jika hujan sangat licin
62	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	RT. 006 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Kondisi Jalan masih tanah dan menanjak Jika hujan sangat licin
63	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Jalan Teratai RT. 006 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Kondisi Jalan masih tanah dan menanjak Jika hujan sangat licin
64	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Jalan Anggrek RT. 006 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Kondisi Jalan masih tanah dan menanjak Jika hujan sangat licin
65	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	jl taman bahagia rt 06, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	terjadinya luapan air yang besar saat hujan
66	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	jln taman bahagia rt 06, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jalan penghubung tidak layak
67	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Jalan Suwarso RT. 006 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Kondisi Jalan masih tanah dan menanjak Jika hujan sangat licin
68	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	jln taman bahagia rt 06, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jalan belum maksimal di lewati
69	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	Jl taman bahagia rt 06, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	terkikisnya tanah di pinggir jalan
70	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	Jl Banyuwangi rt 07, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	tersumbat saluran air dan meluapnya air
71	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Elisa Barur RT. 006 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Kondisi Jalan masih tanah dan menanjak Jika hujan sangat licin

72	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Care 2 RT. 006 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Kondisi Jalan masih tanah dan menanjak Jika hujan sangat licin
73	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Jl Banyuwangi rt 07, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	tersumbatnya air di sekitar jalan dikarenakan tidak ada saluran pembuangan
74	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Mawar RT. 006 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Kondisi Jalan masih tanah dan menanjak Jika hujan sangat licin
75	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Elai RT. 006 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Kondisi Jalan masih tanah dan menanjak Jika hujan sangat licin
76	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Jln Banyuwangi rt 07, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan belum maksimal
77	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Mbah Miran RT. 006 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Kondisi Jalan masih tanah dan menanjak Jika hujan sangat licin
78	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl Banyuwangi pertanian 2 rt 07, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	tidak layaknya jembatan digunakan
79	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Teratai RT. 006 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Kondisi Jalan masih tanah dan menanjak Jika hujan sangat licin
80	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	jl Banyuwangi-halimah RT 07, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	terkikisnya pinggir jalan dan luapan air saat hujan
81	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Anggrek RT. 006 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Kondisi Jalan masih tanah dan menanjak Jika hujan sangat licin
82	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Suwarso RT. 006 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Kondisi Jalan masih tanah dan menanjak Jika hujan sangat licin
83	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Jalan Denkav RT. 006 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Kondisi Jalan belum ada drainase sehingga jika hujan air meluap kejalan
84	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Jalan Care 2 RT. 006 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Kondisi Jalan belum ada drainase sehingga jika hujan air meluap kejalan
85	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Jalan Elisa Barur RT. 006 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Kondisi Jalan belum ada drainase sehingga jika hujan air meluap kejalan
86	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	Jalan Elisa Barur RT. 006 Kel. Amborawang darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Sebagian Jalan longsor dan miring
87	Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir	RT. 006 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Sering Terjadi Banjir di pemukiman Warga dan Kebun Warga
88	Pemeliharaan Penerangan Bangunan di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Denkav RT. 006 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Butuhnya penerangan Kondisi dimalam hari sangat gelap tiang belum ada lampu jalan
89	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Melati RT 1 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Perlu nya Lanjutan Semenisasi Jalan Melati RT 1 Kelurahan Salok Api Darat
90	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Poros RT 01 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tidak adanya Turap Jalan Poros Arah Ke Pantai Ambalat Jalan Poros RT 01 Kel Salok Api Darat
91	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	RT 1 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Rumah yang tidak layak jadi sangat dibutuhkan Bedah Rumah RT 1 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
92	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Gang Melati III RT 1 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan yang masih rusak jadi dibutuhkan Semenisasi Gang Melati III RT 1 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
93	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	Jalan Melati RT 1 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tidak ada Turap Parit jadi dibutuhkan Pembuatan Turap Parit Jalan Melati RT 1 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
94	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Pondok Pinang RT 1 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tidak adanya Jembatan sehingga dibutuhkan Pembuatan Jembatan Jalan Pondok Pinang RT 1 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
95	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Gang Patria RT 2 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan masih rusak sehinggan dibutuhkan Peningkatan Jalan (Semenisasi) Gang Patria RT 2 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
96	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Gang Salak RT 2 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Badan Jalan Gang Salak RT 2 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat

97	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Jl. Margorukun RT 2 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan yang masih rusak sehingga dibutuhkan Peningkatan Jalan (Semenisasi) Jl. Margorukun RT 2 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
98	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Jl.Soekarno-Hatta KM 44 RT 01, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Rehab Langgar Nurul Jannah RT 01
99	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl yos Sudarso rt 04, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	tidak adanya parit pembuangan air hujan dan limbah rumah tangga
100	Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir	Jl KH Agus Salim Rt 04, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	tidak ada pembuangan air hujan
101	Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir	Jl KH Agus Salim RT 04, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	tidak adannya pembuangan air hujan
102	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Jln KH Agus Salim RT 04, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Akses jalan darat kurang baik
103	Pembangunan/peningkatan Jalan Jembatan Ulin Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	Jl KH Agus Salim Rt 04, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	akses jalan kurang baik
104	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl KH Agus Salim RT 04, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	tidak adanya pembuangan air hujan di lahan pertanian dan perkebunan
105	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	JL KH Agus Salim rt 04, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Akses jalan kurang baik
106	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl KH Agus Salim RT 04, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	akses jalan kurang baik di lewati
107	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl KH Agus Salim RT 04, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jalan darat kurang baik
108	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl KH Agus Salim RT 04, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	tidak memiliki akses jalan
109	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	Jl KH Agus Salim rt 04, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Terkikisnya pinggiran jalan
110	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	JL KH Agus Salim rt 04, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	terkikisnya jalan pada saat hujan deras
111	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	JL KH Agus Salim rt 08, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tidak lancarnya pembuangan air
112	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Jl Perkebunan RT 08, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	aliran air tidak lancar
113	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	JL Pariwisata 2 RT 08, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	tanah di tepi sungai longsor
114	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl KH Agus Salim RT 08, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jalan berlubang
115	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	JL Pariwisata rt 08, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jalan tidak rata
116	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl Perkrbunan 1 rt 08, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	terdapat banyak lubang di jalan
117	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl Perkebunan 2 rt 08, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jalan banyak lubang dan tidak rata
118	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	JL Setia Kawan RT 08, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	badan jalan banyak berlubang
119	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	JL Pariwisata RT 08, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	aliran air sungai tidak lancar
120	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	jl setia kawan rt 08, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tanah di tepi sungai longsor
121	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	jl Andi Sindrang RT 08, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	tidak lancarnya aliran air sungai
122	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jl Lekuk seribu rt 08, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Seringnya air meluap
123	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl Andi Sindrang gang persatuan rt 08, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	banyaknya lubang di jalan
124	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl Andi Sindrang Gang Simpang tujuh rt 08, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jalan rusak
125	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	JL Andi Sindrang RT 08, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jalan rusak berat
126	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	jl Andi Sindrang lekuk seribu rt 08, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan tidak terpelihara dengan baik
127	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Gang Sumbertirto RT 2 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tidak badan jalan sehingga dibutuhkan Pembuatan Badan Jalan Gang Sumbertirto RT 2 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
128	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Gang Family RT 2 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Bara, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tidak ada badan jalan sehingga dibutuhkan Pembuatan Badan Jalan Gang Family RT 2 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
129	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Gang Mirin RT 2 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan yang masih rusak sehingga dibutuhkan Semenisasi Gang Mirin RT 2 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat

130	Pemeliharaan Penerangan Bangunan di Kecamatan Samboja Barat	JL. Blitar RT 2 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tidak ada Lampu sehingga dibutuhkan Pengadaan Tiang Lampu Jalanan JL. Blitar RT 2 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
131	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Jalan Mappadendang Gang Alif RT 3 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tidak ada parit sehingga dibutuhkan Pembuatan Parit Jalan Mappadendang RT 3 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
132	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Gang Murni RT 3 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan yang masih rusak sehingga dibutuhkan Semenisasi Gang Murni RT 3 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
133	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Mappadendang RT 3 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan yang masih rusak sehingga dibutuhkan Lanjutan Pembuatan Badan Jalan Mappadendang RT 3 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
134	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	Gang Buni Syahran RT 3 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tidak adanya turap sehingga dibutuhkan Pembuatan Turap Gang Buni Syahran RT 3 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
135	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	JL Margorukun RT 4 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan yang masih rusak sehingga dibutuhkan Lanjutan Semenisasi jl. Bata Merah menuju JL Margorukun RT 4 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
136	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl. Bata Merah RT 4 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tidak adanya jembatan sehingga dibutuhkan Jembatan Kecil Jl. Bata Merah RT 4 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
137	Pembangunan Pos Keamanan di Kecamatan Samboja Barat	RT 4 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tidak adanya banduso sehingga dibutuhkan Pembangunan banduso/pondok keranda RT 4 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
138	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Gang Bersama RT 4 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan yang masih rusak sehingga dibutuhkan Peningkatan jalan Gang Bersama RT 4 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
139	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Gang Petteran RT 4 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tidak adanya gorong sehingga dibutuhkan Pembuatan Badan Jalan Gang Petteran RT 4 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
140	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Gang Bersama RT 4 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tidak adanya Saluran Drainase sehingga dibutuhkan Pembuatan Saluran Drainase Gang Bersama RT 4 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
141	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Gang Mandiri RT 4 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tidak adanya Jembatan sehingga dibutuhkan Pembuatan Jembatan Kecil Gang Mandiri RT 4 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
142	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Gang Setia Kawan RT 4 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan yang masih rusak sehingga dibutuhkan Peningkatan jalan Gang Setia Kawan RT 4 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
143	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	BPU RT 4 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Lantai rusak sehinnga dibutuhkan Pengecoran Lantai BPU RT 4 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat

144	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Gang Mandiri RT 4 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tidak adanya Saluran Drainase sehingga dibutuhkan Pembuatan Saluran Drainase Gang Mandiri RT 4 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
145	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Gang Bersama RT 4 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan yang masih rusak sehingga dibutuhkan Lanjutan Pengerasan jalan Gang Bersama RT 4 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
146	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Mushola Nurul Taqwa RT 4 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	WC rusak sehingga dibutuhkan Rehab WC Mushola Nurul Taqwa RT 4 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
147	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Poros JL Setia Tani RT 5, 6,7 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan yang masih rusak sehingga dibutuhkan Semenisasi Jalan Poros JL Setia Tani RT 5, 6,7 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
148	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	JL Setia Tani RT 5, 6,7 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tidak adanya Turap Parit sehingga dibutuhkan Pembuatan Turap Parit Jalan Poros JL Setia Tani RT 5, 6,7 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
149	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Gang Padaidi RT 5 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan yang masih rusak sehingga dibutuhkan Semenisasi Gang Padaidi RT 5 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
150	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Teratai Putih 2 RT 5 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tidak adanya gedung posyandu sehingga dibutuhkan Pembuatan Posyandu Teratai Putih 2 RT 6 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
151	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	JL Setia Tani RT 5 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tidak adanya Jembatan sehingga dibutuhkan Pembuatan Jembatan JL Setia Tani RT 5 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
152	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Gang Laderi RT 5 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan yang masih rusak sehingga dibutuhkan Peningkatan Jalan Gang Laderi RT 5 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
153	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Jalan Poros RT 5,6 dan 7 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan Rusak sehingga dibutuhkan Semenisasi Jalan Poros RT 5,6 dan 7 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
154	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	alan Setia Tani RT 6 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan yang masih rusak sehingga dibutuhkan Lanjutan Semenisasi Jalan Setia Tani RT 6 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
155	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Setia Tani RT 6 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tidak adanya Turap Jalan sehingga dibutuhkan Lanjutan Turap Jalan Setia Tani RT 6 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
156	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Gang Sambir RT 6 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan yang masih rusak sehingga dibutuhkan Lanjutan Semenisasi Gang Sambir RT 6 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat

157	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Gang Langgar RT 6 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan yang masih rusak sehingga dibutuhkan Semenisasi Gang Langgar RT 6 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
158	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	JL Gunung Dua RT 7 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan yang masih rusak sehingga dibutuhkan Lanjutan Semenisasi JL Gunung Dua RT 7 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
159	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	JL Mappadendang RT 7 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan yang masih rusak sehingga dibutuhkan Peningkatan Jalan Gunung Dua Tembus JL Mappadendang RT 7 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
160	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	JL Gunung Dua RT 7 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tidak adanya parit sehingga dibutuhkan Lanjutan Pembuatan Parit JL Gunung Dua RT 7 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
161	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Pembangunan Posyandu Teratai Putih IV RT 8 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Gedung posyandu masih 50 persen selesai sehingga dibutuhkan Lanjutan Pembangunan Posyandu Teratai Putih IV RT 8 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
162	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Gang Nasar RT 8 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan yang masih rusak sehingga dibutuhkan Semenisasi Gang Nasar RT 8 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
163	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Gang Saidir RT 8 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan yang masih rusak sehingga dibutuhkan Semenisasi Gang Saidir RT 8 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
164	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Gang Rahman RT 8 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan yang masih rusak sehingga dibutuhkan Peningkatan Badan Jalan Gang Rahman RT 8 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
165	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Gang Family RT 8 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tidak adanya parit sehingga dibutuhkan Pembuatan Parit Gang Family RT 8 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
166	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	Jalan Inpres RT 9 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tidak adanya Turap Jalan sehingga dibutuhkan Lanjutan Pembuatan Turap Jalan Inpres RT 9 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
167	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Inpres RT 9 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tidak adanya normalisasi sehingga dibutuhkan Normalisasi Sungai Jalan Inpres RT 9 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
168	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	SD 032 Jalan Inpres RT 9 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tidak adanya turap sehingga dibutuhkan Turap Halaman Belakang SD 032 Jalan Inpres RT 9 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
169	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Gang. Barokah RT 10 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan yang masih rusak sehingga dibutuhkan Semenisasi Jalan Barokah RT 10 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat

170	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Gang.Amanah RT 10 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan yang masih rusak sehingga dibutuhkan Semenisasi Gang.Amanah RT 10 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
171	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Gang SUKARNI dalam RT 10 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan yang masih rusak sehingga dibutuhkan Semenisasi Gang SUKARNI dalam RT 10 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
172	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Gang.Masjid RT 10 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan yang masih rusak sehingga dibutuhkan Semenisasi Gang.Masjid RT 10 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
173	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Gang.Sabri RT 10 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan yang masih rusak sehingga dibutuhkan Semenisasi Gang.Sabri RT 10 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
174	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	gang,sukarni RT 10 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tidak adanya turap sehingga dibutuhkan Pembuatan Turap gang,sukarni RT 10 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
175	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	Jalan Poros RT 10 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tidak adanya parit sehingga dibutuhkan Pembuatan Parit Jalan Poros RT 10 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
176	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Gang Sabri RT 10 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tidak adanya parit sehingga dibutuhkan Pembuatan Parit Gang Sabri RT 10 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
177	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Gang.Amanah RT 10 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Perlu nya Lanjutan sehingga dibutuhkan Lanjutan Pembuatan Parit Gang.Amanah RT 10 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
178	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Gang Sabri RT 10 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tidak adanya jembatan sehingga dibutuhkan Pembuatan jembatan Gang Sabri RT 10 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
179	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	jalan.barokkah RT 10 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tidak adanya turap jalan sehingga dibutuhkan Pembuatan turap jalan.barokkah RT 10 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
180	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Posyandu Teratai Putih 1 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tidak ada Kanopi jadi dibutuhkan Pembuatan Kanopi antara Posyandu dengan BKB Posyandu Teratai Putih 1 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
181	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Jl. Soekarno-Hatta KM 44 Gang Etam RT 01 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Lanjutan Pengerasan Jalan Gang Etam RT 01RT 01 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat
182	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Jl. Soekarno-Hatta Gang Anwar RT 01 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Semenisasi Jalan Gang H. Anwar RT 01 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat
183	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Jl. Soekarno-Hatta Gang Sedulur Mandiri KM 44 RT 01Kel. BUkit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Lanjutan Semenisasi Gang Sedulur Mandiri RT 01 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat
184	Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir	Normalisasi Sungai Kampung Dayak RT.006 Kel. Amborawang Darat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Sering Terjadi Banjir di pemukiman Warga dan Kebun Warga
185	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Jalan Anggrek RT. 006 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Kondisi Jalan belum ada drainase sehingga jika hujan air meluap kejalan

186	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Jalan Santri RT. 008 Kel. Amborawang Darat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Perlunya Rehab Mushola Yayasan Alfa Salam
187	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Jalan Santri RT. 008 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Perlunya Pembangunan tempat wudhu Yayasan Alfa Salam RT. 008 Kel. Amborawang Darat
188	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Jalan Santri RT. 008 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Perlunya Pembangunan tempat wudhu Mushola Yayasan Alfa Salam RT. 008 Kel. Amborawang Darat
189	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Jl Taman Bahagia RT 06, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	belum adanya lantai keramik
190	Rehabilitasi Jalan Menuju Akses Pendidikan,Kesehatan, Wisata dan Jalan Produksi Kabupaten	Jl pariwisata rt 08, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jalan menuju wisata kurang maksimal
191	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Jl Andi Sindrang RT 08, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	belum adanya lapangan yang memadai
192	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Jln Pancur RT 07, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Belum adanya bangunan posyandu
193	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana Dermaga Sungai dan Danau	Jln Andi sindrang RT 08, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Belum adanya jembatan menuju dermaga
194	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana Dermaga Sungai dan Danau	Jln Poros Ambarawang laut rt 01, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jembatan nelayan menuju dermaga belum maksimal
195	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	Jalan Hidup Baru KM 45 Gang Amanah RT 06 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Turap Badan Jalan Gang Amanah RT 06 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat
196	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Tani Aman KM 45 RT 08 Kel. Bukit Merdeka Kec. Sambar, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Lanjutan Semenisasi Jalan Tani Aman KM 45 RT 08 Kel. Bukit Merdeka Kec. Sambar
197	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Jl. Soekarno-Hatta KM 52 Gang Mandiri RT 16 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengerasan Badan Jalan Gang Mandiri RT 16 ukuran 4 X 150 M
198	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Jl. Mekar Baru KM 45 RT 09 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Lanjutan Semenisasi Jalan Mekar Baru RT 09
199	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	Jl. Mekar Baru KM 45 RT 09 Kel Bukit Merdeka Kec. Sambar, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Parit Jl. Mekar Baru KM 45 RT 09
200	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl. Mekar Baru RT 09 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja BArat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Jembatan Jl. Mekar Baru RT 09
201	Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam PAUD	Jln Poros Ambarawang laut rt 02, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Alat permainan edukasi kurang memadai
202	Pembangunan Ruang Kelas/Guru PAUD	Jln Poros Ambarawang Laut rt 02, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Ruang kelas kurang
203	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Jl.Soekarno-Hatta KM 48 RT 13 Kel. BUkit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Rehab Posyandu Karya Hidup Baru 2
204	Pembangunan Ruang Kelas/Guru PAUD	Jln Poros Ambarawang laut rt 08, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Ruang guru kurang
205	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jl Poros Ambarawang Laut RT 02, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Ruang kelas rusak
206	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jl. Soekarno_Hatta KM 50 RT 15 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja BArat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan Laptop Posyandu Karya Hidup Baru 3
207	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jl Poros Ambarwang laut rt 02, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	terdapat ruang kantor rusak
208	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Jl. Soekarno-Hatta KM 50 RT 15 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Rehab Posyandu Karya Hidup Barau 3
209	Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam PAUD	Jl. Soekarno-Hatta KM 50 RT 15 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja BArat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan Alat Permainan Posyandu Karya Hidup Baru 3
210	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan Samboja Barat	Jl. Soekarno-Hatta KM 50 RT 15 Kel. Bukit Merdeka Kec. SAmboja BArat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan Tandon Air Posyandu KHB 3
211	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jl. Soekarno-Hatta KM 50 RT 15 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan Kipas Angin Posyandu Karya Hidup Baru 3
212	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jl. Soekarno-Hatta KM 50 RT 15 Kel. Bukit Merdeka Kec. SAmboja BArat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan Printer Posyandu Karya Hidup Baru 3
213	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jl. Soekarno-Hatta KM 50 RT 15 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja BArat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan Printer Posyandu Karya Hidup Baru 3
214	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jl. Soekarno-Hatta KM 50 RT 15 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja BArat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan HP Posyandu Karya Hidup Baru 3
215	Pembangunan Ruang Kelas/Guru PAUD	Jl. Soekarno-Hatta KM 48 RT 13 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Penambahan Ruang Belajar TK. Cahaya Bunda
216	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jl. Soekarno-Hatta KM 48 RT 13 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Plafon Ruang Kelas TK. Cahaya Bunda

217	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	RT 2 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tidak adanya gedung sehingga dibutuhkana Pembangunan Gedung Posyandu Lansia Perkutut 2 RT 2 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
218	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	RT 6 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tidak ada Gedung sehingga dibutuhkan Pembangunan Posyandu TP 2 RT 6 Kel Salok Api Darat Kecamatan Samboja Barat
219	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Jl. Karya Polewali KM 48 RT 17 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Rehab Jalan Kelompok Tani RT 17 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja
220	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Jl. Karya Polewali KM 48 RT 17 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Pagar Langgar Nur Ikhlas RT 17
221	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Jl. Karya Polewali KM 48 RT 17 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Pagar Mesjid Al-Ikhlas RT 17
222	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Jl. Soekarno-Hatta Gang Husin Sangaji RT 02 Kel. BUkit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Semenisasi Gang Husin Sangaji RT 02
223	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl.Soekarno-Hatta KM 45 RT 02 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Parit RT 02
224	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Jl. Soekarno-Hatta KM 45 Gang Hasbullah RT 02 Kel. BUkit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pelebaran Jalan Gang Hasbullah RT 02
225	Pemeliharaan Penerangan Bangunan di Kecamatan Samboja Barat	Jl. Soekarno-Hatta KM 45 RT 02 Kel. BUkit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Penerangan Jalan RT 02
226	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl. Hidup Baru KM 45 RT 03 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Lanjutan Parit RT 03
227	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Jl. Rawa Indah KM 45 RT 03 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Parit Jalan Rawa Indah RT 03
228	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Salok Api Laut RT.002 Kelurahan Salok Api Laut Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Belum tersedianya jalan yang baik menuju arah wisata pantai maka diperlukannya Pengerasan Badan Jalan Padaidi RT.002 (Pantai) Kel. Salok Api Laut
229	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Salok Api Laut RT.03 Kel. Salok Api Laut Kec. Samboja Barat , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Belum tersedianya jalan yang baik maka diperlukan Lanjutan Semenisasi Gang Masjid 2 RT.003 Kel. Salok Api Laut
230	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl. Soekarno-Hatta Gang Kelompok Tani KM 50 RT 14, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengerasan Gang Kelompok Tani
231	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Jl. Soekarno-Hatta KM 50 RT 14, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Semenisasi Parkiran Mesjid Istiqlal KM 50 RT 14
232	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Salok Api Laut RT.004 Kel. Salok Api Laut Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Belum tersedianya jalanan yang baik sehingga diperlukan Pelebaran Jalan Pelajar RT.004 Kel. Salok Api Laut
233	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl. Soekarno-Hatta KM 50 RT 14, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Rehab Semenisasi Jalan SDN 035
234	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Jl. Bukit Baruga KM 45 RT 05 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Parit Jalan Bukit Baruga
235	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Jl. Hidup Baru KM 45 RT 06 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Pagar Mesjid Jabal Nur
236	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Jl. Hidup Baru KM 45 RT 07 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Parkir Mesjid Ar-Rahman
237	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Jl. Hidup Baru KM 45 RT 07 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Rehab Lapangan Bulu Tangkis
238	Pemeliharaan Penerangan Bangunan di Kecamatan Samboja Barat	Jl. Tani Aman KM 45 RT 08 Kel. BUkit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan Jaringan Listrik Jl. Tani Aman KM 45 RT 8
239	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl. Kuburan Baru KM 48 RT 13 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Lanjutan Semenisasi Jalan Kuburan Baru RT 13
240	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Jl. Kuburan Baru KM 48 RT 13 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Pendopo Kuburan Baru RT 13
241	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Jl. Soekarno-Hatta KM 52 RT 16 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Pagar Mesjid Al-Muttaqien RT 16
242	Belanja Hibah Lembaga Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Jl. Karya Polewali KM 48 RT 17 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Pagar Kuburan Muslimin RT 17

243	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan Samboja Barat	Jl. Karya Polewali Km 48 RT 17 Kel. bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan Air bersih RT 17
244	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl. Hidup Baru Gang Sawit KM 45 RT 19 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja BArat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Lanjutan Semenisasi Gang Sawit RT 19
245	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl. Hidup Baru KM 45 RT 19 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Semenisasi Jalan Gang Al-Musafirin RT 19
246	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jl. Soekarno-Hatta KM 48 RT 17 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Pagar TK. Cahaya Bunda
247	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jl. Soekarno-Hatta KM 48 RT 13 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Canopy TK. Cahaya Bunda RT 13
248	Belanja Hibah Lembaga Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Jl. Batu Dinding KM 45 RT 10 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan Mebeleir Mts As-Salam Kel. Bukit Merdeka
249	Penyediaan Alat Kesenian	Jl. Soekarno-Hatta KM 48 RT 21 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan Kostum Tari Sanggar Tari Karisma Nusantara
250	Penyediaan Alat Kesenian	Jl. Soekarno-Hatta KM 45 RT 10 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan Kostum Tari Sanggar Tari Aksara Nusantara
251	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Jl. Hidup Baru KM 45 RT 18 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Parit Hidup Baru RT 18
252	Pembekalan Menjahit	Jl. Soekarno-Hatta KM 46 RT 12 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pelatihan Menjahit
253	Pelatihan, Pembinaan dan Pendampingan Bagi Usaha Mikro Olahan Buah, Sayuran dan IKAN	Jl. Soekarno-Hatta Km 46 RT 12 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Mesin Olahan Makanan PKK
254	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Jl. Hidup Baru KM 45 RT 07 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengerasan Jalan Produksi Perkebunan RT 07
255	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl. Hidup Baru KM 45 RT 6,7 dan 18 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Normalisasi Sungai Kelompok Tani Hidup Baru RT 6, 7, 18
256	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan Samboja Barat	Jl. Soekarno-Hatta Km 48 RT 13 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan Tandon Air Posyandu Karya Hidup Baru 2
257	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Jl. Soekarno-Hatta KM 48 RT 21 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Rehab Langgar Al-Istiqomah
258	Ruang Terbuka Non Hijau di perkotaan (Paving, Rabat/Semenisasi)	Jl. Hidp Baru KM 45 RT 19 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Paving Halaman SD 040
259	Sarana Prasarana Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (Karang Taruna, Panti Asuhan, Panti Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan,)	Jl. Soekarno-Hatta KM 46 RT 12 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan Proyektor Karang Taruna Anggakara
260	Sarana Prasarana Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (Karang Taruna, Panti Asuhan, Panti Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan,)	Jl. Soekarno-Hatta Km 46 RT 12 Keel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan Laptop dan Printer Karang Taruna Anggakara
261	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl. Hidup Baru KM 45 Rt 07 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Lanjutan Normalisasi sungai RT 07 sepanjang 2 kilometer
262	Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam PAUD	Jl. Kampung Nenas KM 51 RT 20 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan Alat Permainan Posyandu Karya Hidup Baru 5
263	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jl. Kampung Nenas RT 20 KM 51 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan Laptop Posyandu Karya Hidup Baru 5
264	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jl. Kampung Nenas KM 51 RT 20 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan Printer Posyandu Karya Hidup Baru 5
265	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jl.Soekarno-Hatta KM 51 RT 20 Kel. BUkit Merdeka Kec, Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan HP Posyandu Karya Hidup Baru 5
266	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan Samboja Barat	Jl. Kampung Nenas KM 51 RT 20 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan Tandon dan Pipa Karya Hidup Baru 5
267	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jl. Soekarno-HAtta KM 46 RT 12 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan Kipas Angin, Sound System, Karpet PKK Bukit Merdeka
268	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Samboja Barat	Jl. Soekarno-Hatta KM 46 RT 12 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Rehab Kantor PKK Bikit Merdeka 8 X 10 M
269	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jl. Batu Dinding KM 45 RT 10 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Rehab TK. Tunas Perjuangan RT 10
270	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jl. Batu Dindig KM 45 RT 10 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Paving Halaman TK. Tunas Perjuangan

271	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Jl. Soekarno-Hatta KM 46 RT 11 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Pagar Gereja Katolik Utuslah Rohmu Ya Kudus
272	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Jl. Soekarno-Hatta KM 46 RT 12 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kuburan Katolik RT 11
273	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	Jl. Mitra Berlian KM 51 RT 20 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pemasangan Gorong-gorong Jalan Mitra Berlian KM 51 RT 20
274	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Kuburan Muslimin KM 51 RT 20 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Lanjutan Semenisasi Jalan Kuburan KM 51 RT 20
275	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl. Kampung Nenas KM 51 RT 20 Kel. BUkit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Lanjutan Semenisasi Jalan Kampung Nenas RT 20 KM 51
276	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	Jl. Kampung Nenas KM 51 RT 20 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pemasangan Turap Jembatan 2 RT 20
277	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Jl. Kampung Nenas KM 51 Rt 20 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Parit Jl. Kampung Nenas KM 51 RT 20
278	Penyediaan Alat Penunjang / Peraga (BKB Kit, BKB HI, BKL Kit, BKB Kit Stunting, BKR Kit, Kit Siap Nikah Anti Stunting)	Jl. Soekarno-Hatta Km 50 RT 15 Kel. Bukitt Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan Alat Permainan Posyandu KHB 3
279	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jl. Soekarno-Hatta KM 48 RT 21 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Gedung Sanggar Tari Karisma Nusantara
280	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Jl. Flabomor 1 KM 46 RT 11 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Parit Jalan Flabomora I
281	Penyediaan Alat Kesenian	Jl. Soekarnp-Hatta KM 46 RT 12 Kel. Bukit Merdeka Kec. SAmboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan Alat Habsi
282	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jl. Soekarno-Hatta Km 44 RT 01 Kel. BUkit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan Laptop Posyandu Lansia Hidup Sehat 2
283	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jl. Soekarno-Hatta Km 44 RT 01 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan Printer Posyandu Lansia Hidup Sehat 2
284	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jl. Soekarno-Hatta Km 44 RT 01 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan HP Posyandu Lansia Hidup Sehat 2
285	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	Jl. Soekarno-Hatta KM 44 RT 01 Kel Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Gedung Posyandu Lansia Hidup Sehat 2
286	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Jl. Hidup Baru KM 45 RT 18 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Rehab Lapangan Bulu Tangkis RT 18
287	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Jl. Hidup Baru KM 45 RT 19 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Parit RT 19
288	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jl. Kuburan Katolik Km 46 RT 12 Kel. BUkit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Gasebo Kuburan Katolik
289	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren (hibah uang)	Jl. Soekarno-Hatta KM 48 RT 12 Ke. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Semenisasi Halaman Pesantren Tahfiz As Sholihin
290	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren (hibah uang)	Jl. Soekarno-Hatta Km 46 RT 12 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Gapura Pesantren Tahfiz As Sholihin
291	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Jl. Soekarno-Hatta KM 51 RT 15 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Parit 01 Kampung Nenas
292	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan Samboja Barat	Jl. Soekarno-Hatta KM 50 RT 15 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Sumur Bor Kampung Nenas RT 15
293	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jl. Soekarno-Hatta Km 50 RT 15 Kel. BUkit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Gapura Kuburan Muslimin Km 50 RT 15
294	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jl. Kuburan Muslimin KM 50 RT 15 Kel. BUkit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pagar Keliling Kuburan Muslimin RT 15 KM 50
295	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Jl. Soekarno-Hatta KM 46 RT 12 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Semenisasi Belakang Gereja Utuslah Rohmu Ya Kudus
296	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Jl. Hidup Baru KM 45 RT 19 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan menara Mesjid Al-Musafirin RT 19
297	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Jl. Hidup Baru KM 45 RT 22 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Pagar Lapangan Bola RT 22
298	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Jl. Hidup Baru Km 45 RT 22 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Pagar Lapangan Bola Volly

299	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Jl. Hidup Baru Km 45 RT 22 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Parit Beton RT 22 B
300	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Jl. Hidup Baru KM 45 RT 22 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Parit Beton RT 22 A
301	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Jl. Hidup Baru KM 45 RT 22 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan saluran drainase Lapangan Bola
302	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Jl. Soekarno-Hatta KM 48 RT 21 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembuatan Lapangan Senam
303	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Jl. Soekarno-Hatta KM 48 RT 21 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan Alat Fardu Kifayah dan keranda mayat RT 21
304	Pengadaan Bibit/Tanaman untuk pemulihan lahan jenis Fast Growing (Tanaman yang cepat tumbuh(tanaman buah-buahan, tumbuhan Sengon, pinus, eucalyptus, Acasia crassicarpa, pulai, Alaban, sungkai, ketapang, lamtoro, trembesi, kaliandra)	Jl. Tani Aman KM 45 RT 08 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan bibit cabe rawit, pupuk dan Mulsa Kelompok Tani Aman
305	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jl. Soekarno-Hatta KM 45 RT 02 Kel. BUkit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Rehab Atap SD 026 Km 45 RT 2Jl. Soekarno-Hatta
306	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jl. Hidup Baru KM 45 RT 19 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Bangunan RKB SDN 035
307	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jl. Soekarno-Hatta KM 46 Rt 12 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Rehab Gedung BPU Kel. Bukit Merdeka
308	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jl. Soekarno-Hatta KM 46 RT 12 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Bara, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Rehab Kantor LPM Kel. Bukit Merdeka
309	Fasilitasi sarana prasarana desa	Jl. Tani Aman KM 45 RT 08 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan Multifator / Trak tor Mini Kelompok Tani Aman
310	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	jembatan tani makmur 2 jln. tani makmur RT 07 kel. Sungai Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jembatan tani makmur merupaka akses utama warga ke kebun serta mengangkut hasil pertanian seperti timun dll, kondisinya tidak bisa di lewati mobil
311	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	jln muara wali RT 18 Kel, Sungai Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	merupak akses utama warga ke kebun kondisinya rusak parah
312	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	jembatan saka kanan RT 11 Kel. Sungai Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jembatan sudah miring serta pondasi sudah tidak kuat mobil tidak bisa melwati untuk hasil pertanian termasuk padi
313	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	jalan rawa lembur RT 22 tembus ke RT 21 kel sungai merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	akses jalan berlubang dan licin apa bila hujan akses utama kelompok tani rawa lembur
314	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	peningkatan jalan sangkutu RT 13, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jalan berlumpur dan berlubang apa bila hujan kelompok tani sangkut tidak bisa mengangkut hasil panen dan ini bener2 sangat di harapakan adanya peningkatan jalan
315	Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir	sungai buluh RT 14 Kel. Sungai Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	sungai buluh masih mudah meluap dan seering terjadi banjir sehingga menyebabkan masyarakt sekitar gagal panen
316	Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir	Sungai Beras RT 13 Kelurahan Sungai Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	sungai beras belum selesai di normalisasi karna bagian muara sungai masih terjadi sedimentasi serta penyempitan lebar sungai
317	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	jalan kantor baru RT 02 Kelurahan Sungai Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jalan akses ke kantor kelurahan yang baru masih bersifat tanah dan banyak berlubang
318	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	jalan kebun klengkeng RT 22 Kel. Sungai Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jalan masih tanah dan licin sulit untuk warga mengangkut hasil panen kebun
319	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	peningkatan jalan tani makmur RT 07, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jalan berlumpur dan berlubang akses utama kelompok tani makmur
320	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	jembatan kebun lengkeng RT 22 Kel Sungai Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	warga tidak bisa mengangkut hasil panen
321	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	pembangunan posyandu melati 7 kel. sungai merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	belum tersedianya gedung posyandu melati 7
322	Fasilitasi Organisasi keolahragaan	pembuatan tribun lapngan damai, jalan damai RT 04 , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	belum tersedianya tribun pemain di lapangan damai
323	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	pembangunan posyandu melati 2 kel sungai merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	belum tersedianya bangunan posyandu melati 2
324	Fasilitasi pembangunan gedung Posyandu	posyandu melati 3 kel. sungai merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Belum tersedianya bangunan posyandu melati 3

325	Penyediaan perlengkapan Jalan (LPJU)	jalan akbar RT 11, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	belum tersedianya penerangan jalan lingkungan RT 11 bahaya bagi masyarakat yang melintas
326	Penyediaan perlengkapan Jalan (LPJU)	penyediaan LPJU jalan merdeka RT 02 tembus RT 01 , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	sepanjang jalan merdeka rt 02 tembus ke rt 1 belum tersedianya LPJU bahaya bagi warga yang melintas
327	Penyediaan perlengkapan Jalan (LPJU)	jln sangkutu RT 13, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jalan sangkutu rt 13 dan rt 25 belum tersedia lampu jalanan umum
328	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	peningkatan jalan bersama RT 03, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jalan masih tanah dan licin apabila hujan
329	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	peningkatan jalan karya baru, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	kondisi jalan karya baru masih dalam belum baik
330	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	peningkatan jalan Damai RT 04 Kel. Sungai Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jalan masih belumpur dan licin menyulitkan warga untuk pergi ke kebun dan mengangkut hasil pertanian
331	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	peningkatan jalan karya 2 RT 04 Kel. Sungai Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jalan sehari hari masyarakat rt 04 dan lingkungan padat penduduk
332	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	peningkatan jalan panti RT 04 Kel. Sungai Merdkea, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	kondisi jalan panti masih licin
333	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	peningkatan jalan wana RT 04 Kel. Sungai Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jalan sehari2 masyarakat kondisinya parah
334	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	penurapan jalan wan RT 04 Kelurahan Sungai Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	sebagian jalan longsor maka perlu dibuatkan turap serta aliran air untuk mengurasi pengikisan tanah
335	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	peningkatan jalan ceri RT 05 Kelurahan Sungai Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jalan ceri kondisinya sudah tidak layak dan kondisi padat lingkungan
336	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	jalan munawar RT 05 Kelurahan Sungai Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	kondisi jalan kurang lyak di lingkungan padat penduduk
337	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	peningkatan jalan gg pratama RT 05 Kelurahan Sungai Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	kondisi jalan kurang layaj sementara jalan ini di lingkungan padat penduduk
338	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	peningkatan jalan gg karya 1 RT 05 Kel Sungai Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jalan berlubang dan kurang layak di lingkungan padat penduduk
339	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Jalan Waduk RT. 008 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Amborawang Darat , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pagar Kuburan belum selesai
340	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	jalan rantau RT 06 Kelurahan Sungai Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	kondisi jalan tanjakan dan licin dan padat penduduk
341	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	peningkatan jalan widyasari RT 06 Kelurahan Sungai Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jalan sebagian besar masih tanah dan apabila hujan maka jalanan licin
342	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	peningkatan jalan kuburan pondok gong RT 08 Kelurahan Sungai Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	warga susah ke keburan kondisi jalan tidak layak dan mobil ambulance tidak bisa masuk sampai ke dalam
343	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	peningkatan jalan guru dayak RT 09 Kelurahan Sungai Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	kondisi jalan masih becek dan berlumpur sementara ada beberapa di dlam nya
344	Pekerjaan Sederhana tidak menambah Aset (Pembersihan Rumput/semak belukar/gulma,sedimentasi lumpur) Di Kecamatan Samboja Barat	RT. 003 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Parit dangkal dan terdapat rumput-rumput yang menyumbat aliran air
345	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Gang Mbah Suradi RT, 003 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan masih tanah jika hujan sangat licin
346	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Gang Pelita RT. 003 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	kondisi jalan banyak yang sudah rusak
347	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	RT. 004 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan masih tanah dan menanjak jika hujan sangat licin
348	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Gang Waluh RT. 004 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan masih tanah jika hujan sangat licin
349	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Jalan Bppn-Handil II RT. 004 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Butuhnya pembangunan pagar kuburan sebagai pembatas dan perlindungan dari hewan
350	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Jalan Bppn-Handil II RT. 004 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Perlunya Pembangunan Pendopo kuburan
351	Penurapan Jalan (Beton/Pasangan Batu)	Penurapan jalan RT 15 Kelurahan Sungai Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	kondisi jalan belum mempunyai aliran air serta menjaga struktur tanah biar tidak longsor
352	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	jalan Tilawatil Quran RT 15 Kelurahan Sungai Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jalan masih kecil dan menyulit kan anak2 berangkat pergi mengaji
353	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	peningkatan jalan Tani RT 15 Kelurahan Sungai Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan Licin dan menyulitkan mengangkut hasil pertanian

354	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Peningkatan jalan RT 18 Kelurahan Sungai Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	kondisinya jalan licin di lingkungan padat penduduk
355	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Pembuatan badan jalan kebun RT 18, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	askes utama warga ke kebun tetapi kondisi sangat tidak layak
356	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Peningkatan jalan sangkutu RT 24, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jalan masih berlubang, jalan utama warga mau di tutup oleh pemilik lahan, jadi jalan yang dipakai sehari hari masih kondisinya parah
357	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Padat Karya RT 21 Kelurahan Sungai Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jalan padat karya masih loicin dan belubang apabila hujan warga tidak bisa mengantar anak ke sekolah
358	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)	peningkatan jalan Awa RT 18 kelurahan Sungai Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	kondisi jalan banyak berlubang dan sangat memperihatikan
359	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	jalan soekarno hatta km 40 RT 26 Kelurahan sungai Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	kondisi paritnya masih buntu dan mudah meluap
360	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	peningkatan jalan muara wali RT 21 , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	kondisi jalan licin dan berlubang
361	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	peningkatan jalan perjuangan RT 19 , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	kondisi jalan banyak berlubang
362	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	pembuatan parit psangan batu jalan kuburan RT 19 , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	belum tersedianya aliran air di sepanjang jalan ke kuburan nasrani
363	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	peningkatan jalan Durian RT 19 , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	kondisi jalan banyak berlubang dan licin apabila hujan
364	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja	RT 011 Kelurahan Handil Baru Darat. , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Lanjutan Semenisasi Jalan Gang La Amii RT 011 Kelurahan Handil Baru Darat. Karena Belum Tersedianya Jalan Yang Memadai Sehingga Perlu Dilaksanakan Kegiatan Tersebut.
365	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	peningkatan jalan kuburan nasrani RT 19, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	kondisi akses ke kuburan nasrani masih sulit di jangkau oleh ambulance
366	Penurapan Jalan (Beton/Pasangan Batu)	pembuatan turap jalan perjuangan RT 19, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	belum tersedinya aliran air ketika hujan serta menjaga struktur tanah
367	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	peningkatan jalan buntu RT 19, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	kondisi jalan berlubang dan licin
368	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	pelebaran dan penurapan jalan sejahtera RT 20, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	kondisi jalan sempit tidak bisa berselihin mobil
369	Penggantian Jembatan Kecamatan Panjang > 6 Meter Struktur Beton	RT 012 Kelurahan Handil Baru Darat., Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembangunan Jembatan Posyandu Anggrek RT 012 Kelurahan Handil Baru Darat. Karena Belum Tersedianya Jembatan Yang Memadai Sehingga Perlu Dilaksanakan Kegiatan Tersebut.
370	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja	RT 012 Kelurahan Handil Baru Darat. , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembangunan Turap Belakang SDN 014 RT 012 Kelurahan Handil Baru Darat. Karena Belum Tersedianya Turap Yang Memadai Sehingga Perlu Dilaksanakan Kegiatan Tersebut.
371	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	peningkatan jalan muara wali baru RT 22, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	kondisi jalan parah sekali
372	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Rambu, Marka, ZOSS (Zona Selamat Sekolah) dan Paku Marka)	Pembuatan ZOSS di SDN 011 Kelurahan Sungai Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	lalu lintas padat dan banyak anak-anak sekolah
373	Pembangunan Embung Perkebunan	Jl.Soekarno-Hatta KM 45 RT 03, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Permohonan Green House Karya Jidup Baru
374	Penyediaan Benih Ikan / Udang	Kelompok Ikan Pokdakan, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Bantuan pakan ikan dan bibit ikan gurame dan nila untuk kolam tanah Pokdakan Barokah
375	Pembangunan Embung Perkebunan	Kelompok Tani Tunas Harapan Dua, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Uppo dan sarana alsinta pengembangan tanaman jagung Kel. Tani Tunas Harapan Dua
376	Pengembangan Sawit Rakyat (Pengadaan Bibit Sawit/Ha)	Kelompok Tani Bukit Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Intens Sawit Kelompok Tani
377	Pengadaan Bibit/Tanaman untuk pemulihan lahan jenis Fast Growing (Tanaman yang cepat tumbuh(tanaman buah-buahan, tumbuhan Sengon, pinus, eucalyptus, Acasia crassicarpa, pulai, Alaban, sungkai, ketapang, lamtoro, trembesi, kaliandra)	Bukit Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Intens Karet
378	Pengembangan Sawit Rakyat (Pengadaan Bibit Sawit/Ha)	Gapoktan Bukit Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Gapoktan Bukit Merdeka
379	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pengadaan Pupuk Sawit/Ha)	Kelompok Tani Hidup Baru, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pestisida dan herbisida Kelompok Tani Hidup Baru
380	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pengadaan Pupuk Sawit/Ha)	Kelompok Tani Bukit Madu, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pestisida buah naga Kelompok Tani Bukit Madu

381	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pengadaan Pupuk Sawit/Ha)	Kelompok Tani Mekar Sari, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pestisida dan Herbisida Kel.Tani Mekar Sari
382	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pengadaan Pupuk Sawit/Ha)	Kelompok Tani Bukit Baruga, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pestisida Kel. Tani Bukit Baruga
383	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	peningkatan jalan Kelompok Tani Merdeka RT 23, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	merupakan akses utama kelompok tani merdeka dan kondisinya sangat licin menyulitkan untuk warga mengakut hasil pertanian
384	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Pelita RT. 005 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Kondisi Jembatan Sudah Rapuh
385	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Jalan Pelita RT. 005 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan Belum Ada Drainasenya jika hujan air meluap ke jalan
386	Pekerjaan Sederhana tidak menambah Aset (Pembersihan Rumput/semak belukar/gulma,sedimentasi lumpur) Di Kecamatan Samboja Barat	Jln. Bppn-Handil II RT. 007 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Parit dangkal dan banyak rumput/semak semak yang menghambat arus air
387	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jln. Bppn-Handil II RT. 007 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jembatan sudah rusak
388	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jln. Besi Tua RT. 007 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan masih tanah dan menanjak jika hujan sangat licin
389	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Nenas RT. 007 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Akses Jalan Masih Tanah dan menanjak jika hujan sangat licin
390	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pengadaan Pupuk Sawit/Ha)	Kelompok Tani Gajan Mada A, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pestisida dan herbisida Kel.Tani Gajah Mada A
391	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pengadaan Pupuk Sawit/Ha)	Kelompok Tani Karya Nenas, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pestisida dan herbisida Kel.Tani Karya nenas
392	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pengadaan Pupuk Sawit/Ha)	Kelompok Tani Makmur Raya, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengerasan jalan produksi perkebunan Kel.Tani Makmur Raya
393	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pengadaan Pupuk Sawit/Ha)	Kelompok Tani Makmur Raya, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengajuan Pestisida dan Herbisida Kel.Tani Makmur Raya
394	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Kelompok Tani Sumber Harapan, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengerasan jalan produksi perkebunan Kel.Tani Sumber Harapan
395	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pengadaan Pupuk Sawit/Ha)	Kelompok Tani Sumber Harapan, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pestisida dan Herbisida Kelompok Tani Sumber Harapan
396	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pengadaan Pupuk Sawit/Ha)	Kelompok Tani Mekar Jaya, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pestisida dan Herbisida Kel.Tani Mekar Jaya
397	Peningkatan Jaringan Irigasi dibawah 1000 Ha	Kelompok Tani Rawa Indah, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Irigasi sawah Kel.Tani Rawa Indah
398	Pengadaan Bibit/Tanaman untuk pemulihan lahan jenis Fast Growing (Tanaman yang cepat tumbuh(tanaman buah-buahan, tumbuhan Sengon, pinus, eucalyptus, Acasia crassicarpa, pulai, Alaban, sungkai, ketapang, lamtoro, trembesi, kaliandra)	Kelompok Tani Mitra Bersama, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan Bibit Durian Musang King Kel. Tani Berlian Mitra Bersama
399	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pengadaan Pupuk Sawit/Ha)	Bukit Merdeka, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	permohonan Hend Traktor
400	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	RT.01 Margomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Akses jalan masih tanah dan becek saat hujan
401	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	RT.01 KEL. MARGOMULYO, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan menuju kuburan muslimin rusak berat
402	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Samboja Barat	RT.01 KEL.MARGOMULYO, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	sekretariat koperasi di kelurahan margomulyo saat ini pinjam pakai bergantian dengan posyandu
403	Normalisasi Saluran Drainase lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	RT.02 KEL.MARGOMULYO, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	MEMPERLANCAR ALIRAN AIR PENYEBAB BANJIR
404	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	RT.03 KEL.MARGOMULYO, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	MEMPERLANCAR ARUS AIR PNYEBAB BANJIR, MENCEGAH LONGSOR
405	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	RT.04 KEL.MARGOMULYO, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	HALAMAN POSYANDU YANG BECEK SAAT HUJAN MEMBAHAYAKAN IBU DAN BALITA YANG DATANG KE POSYANDU
406	Pembangunan dan Perbaikan MCK Umum/Komunal Kecamatan Samboja Barat	RT.04 KEL.MARGOMULYO , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	PEMBUATAN PAGAR POSYANDU GUNA MENJAGA KEAMANAN ASSET POSYANDU
407	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Samboja Barat	RT.01 KEL.MARGOMULYO, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	TRIBUN LAPANGAN GUNA UPACARA HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA KECAMATAN SAMBOJA BARAT
408	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	RT.02 KEL.MARGOMULYO, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	MELANCARKAN AIR MENCEGAH BANJIR
409	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Samboja Barat	RT.03 KEL.MARGOMULYO, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	GEDUNG POSYANDU LANSIA NURI 2 RUSAK BERAT
410	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	RT.02 KEL.MARGOMULYO, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	BUTUH SEMENISASI JALAN YANG MASIH SERING BECEK SAAT HUJAN
411	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	RT.06 KEL.MARGOMULYO, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	kawasan sering banjir

412	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Samboja Barat	Jl. Bppn-Handil II RT.01, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	KEGIATAN HUT RI KECAMATAN SAMBOJA BARAT DILAKSANAKAN DI LAPANGAN KELURAHAN MARGOMULYO, SANGAT DIBUTUHKAN PERBAIKAN TRIBUN UNTUK PANGGUNG KEHORMATAN
413	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	Jl. Bppn-Handil II RT.03, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	SERING TERJADI BANJIR, PERLUNYA PENURAPAN UNTUK MEMPERLANCAR AIR SAAT HUJAN TURUN
414	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Samboja Barat	RT.04, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	KURANGNYA SARANA DALAM PEMERIKSAAN ANAK YANG DILAKSANAKAN OLEH KADER POSYANDU
415	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Samboja Barat	JL.BPPN-HANDIL II, RT.07, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	PERLUNYA LANJUTAN PEMBANGUNAN BPU TERSEBUT KARENA TAHAP PENGERJAAN AWAL HANYA SEBATAS PONDASI DAN TIANG YANG DIBANGUN 3 TAHUN LALU
416	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	JL.BPPN-HANDIL II, RT.03, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	TEMPAT IBADAH (MASJID AL-MUJAHIDIN) SERING TERGENANG AIR SAAT HUJAN DERAS
417	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Samboja Barat	JL.BPPN-HANDIL II, RT.001, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	MENINGKATKAN PRESTASI PEMUDA MELALUI BIDANG BOLA VOLLY DAN DIBUTUHKAN LAPANGAN VOLLY YANG LAYAK
418	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	JLN.BPPN-HANDIL II, RT.03, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	AREA YANG SERING TERJADI BANJIR, AIR DARI EKS TAMBANG
419	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Samboja Barat	RT.03 , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	GEDUNG UNTUK KEGIATAN YANG SANGAT PERLU DI REHAB UNTUK MEMPERKOKOH BANGUNAN
420	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	GG.SUTOYO RT.03, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	JALAN YANG BECEK SAAT MUSIM PENGHUJAN
421	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	GG.MASJID RT.04, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	AREA RAWAN BANJIR, MEMPERLANCAR AIR SAAT HUJAN
422	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	JALAN SUMBER RT.06, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	MEMPERLANCAR AIR DI AREA RAWAN BANJIR
423	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Samboja Barat	JL.BPPN-HANDIL 2, RT.01, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	MENCEGAH BOLA YANG KE ARAH JALAN RAYA YANG MEMBAHAYAKAN PENGENDARA KARENA LAPANGAN TEPAT BERADA DI PINGGIR JALAN KOTA DAN MENCEGAH KENDARAAN RODA 4 MASUK LAPANGAN SEPAK BOLA
424	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	RT.05, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	MENCEGAH LONGSOR
425	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Samboja Barat	RT.04 , Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	ATAP YANG BOCOR
426	Pembangunan/Rehabilitasi Sekretariat Organisasi Kecamatan Samboja Barat	GG.SUTOYO RT.03, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	lantai yang perlu perbaikan guna kenyamanan siswa taman kanak-kanak
427	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	GG.SUTOYO RT.03, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	PEMAVINGAN HALAMAN SDN 007 KARENA MENJADI GENANGAN AIR SAAT HUJAN TURUN
428	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	GG.MASJID RT.04, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	PENGHUBUNG JALAN RT.06 DAN RT.04
429	Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan Samboja Barat	JALAN LAMBAU, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	WARGA YANG MASIH BELUM MENDAPATKAN AKSES PDAM
430	Pemeliharaan Penerangan Bangunan di Kecamatan Samboja Barat	JALAN BPPN HANDIL II, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	PENERANGAN JALAN UMUM YANG BILA MALAM RAWAN KECELAKAAN KARENA GELAP
431	Peningkatan/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	gg.beringin rt.4, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	jembatan perlu di rehab demi keselamatan pengguna
432	Belanja Hibah Lembaga Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	RT. 012 Kel. Amborawang Darat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	belum ada perlengkapan mebelair pada gedung pkk (lemari, meja kerja, kursi kerja, dan kipas angin sebagai penunjang kerja pengurus pkk kel. Amborawang Darat)
433	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Ramis RT. 009 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan masih tanah jika hujan sangat licin
434	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Paelori Rt. 009 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan masih tanah jika hujan sangat licin
435	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Jalan Ramis RT. 009 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan belum ada drainase

436	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Ramis RT. 009 Kel. Amborawang Darat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan Masih tanah jika hujan sangat licin
437	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan UPSA RT. 010 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan Lama sudah rusak dan terkelupas semennya
438	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Kambas RT. 010 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan masih tanah dan bebatuan
439	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jalan Karya Tani RT. 011 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Perlunya lanjutan semenisasi jalan karya tani
440	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Jl. Karya Tani RT. 011 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Lokasi Pemakaman belum ada pagar sebagai tanda batas lahan pemakaman
441	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Jalan Karya Tani RT. 011 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan belum ada drainase
442	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl. Gang Selamet RT. 011 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Kondisi Jalan menanjak dan bebatuan
443	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah (Hibah Uang)	Jl. Karya Tani RT. 011 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Mushola belum ada tempat wudhu yang layak dan perlunya dana rehab bangunan mushola
444	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl. Care 1 RT. 012 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Semenisasi jalan belum selesai
445	Penurapan Jalan (Beton/Pasangan Batu)	Jl. Care 1 RT. 012 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Tanah di samping jalan semakin menurun tergerus air hujan
446	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Jl. Care 1 RT. 012 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan belum ada drainasenya sehingga jika hujan air meluap ke jalan
447	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl. Care 1/Gg. Sumkarno RT. 012 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan masih tanah jika hujan sangat licin
448	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl. Sepadan 1 RT. 013 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	kondisi jalan menanjak dan sangat licin jika hujan
449	Drainase jalan Lingkungan (Beton/Pasangan Batu)	Jl. Sepadan 1 RT. 013 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Jalan belum ada drainase
450	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Di Kecamatan Samboja Barat	Jl. Cempedak RT. 013 Kel. Amborawang Darat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Belum ada akses jalan warga menuju perkebunan yang memadai
451	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl. Pamili RT. 013 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Belum ada akses badan jalan
452	Peningkatan/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Di Kecamatan Samboja Barat	Jl. Gunung Kapur RT. 013 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	akses jalan masih tanah jika hujan licin dan berlubang
453	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat (sarana & prasarana KIM) dan penyelenggaraan sosialisasi, bimtek dan event yang dilaksanakan dengan KIM	Jl. Bppn-Handil II RT. 002 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Perlunya pembangunan Pagar Pembatas area lahan Sekolah SMP 2 Kel. Amborawang Darat
454	Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana Kecamatan Samboja Barat	Jl. Bppn-Handil II RT. 003 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Perlunya pembangunan turap dan pagar belakang bangunan sekolah SD 005 Kel. Amborawang darat untuk menghindari longsor
455	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Rambu, Marka, ZOSS (Zona Selamat Sekolah) dan Paku Marka)	Jl. Bppn-Handil II RT. 003 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Perlunya Pemasangan Rambu keselamatan SD 005 Kel. Amborawang Darat
456	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jl. Bppn-Handil II RT. 003 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Kondisi bangunan TK Kemuning Kelurahan Amborawang Darat Sudah tidak layak di gunakan perlunya rehab total gedung
457	Penyediaan Alat Kesenian	Kelurahan Amborawang Darat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	ada beberapa kelompok kesenian tari yang dinaungi oleh Lembaga Adat kelurahan Amborawang Darat belum memiliki alat kesenian (Gendang, Gong, Gambus, Organ dan Gamelan)
458	Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam PAUD	Jl. Pelita RT. 005 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	masih kurang persediaan APE
459	Pengadaan Mebel PAUD (Pengadaan Meja kursi Guru, Meja kursi Siswa, Lemari rak buku, lemari file,)	Jl. Pelita RT. 005 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	kurangx pasilitas Mebel PAUD
460	Pembangunan Ruang Kelas/Guru PAUD	Jl. Pelita RT. 005 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Kurangx Pasilitas Ruang Kelas

461	Sarana Prasarana Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (Karang Taruna, Panti Asuhan, Panti Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan,)	Kelurahan Amborawang Darat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengadaan Sound system lengkap Speaker Huper Ak. 15 Karang Taruna Kel. Amborawang Darat
462	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	Kelurahan Amborawang Darat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Perataan Tanah Lapangan Bola Baru Kel. Amborawang Darat
463	Pembangunan Gedung Kantor Palayanan Publik (Kantor Desa, BPU Desa, BPU Kecamatan)	Jl. Bppn-Handil II RT. 002 Kel. Amborawang Darat Kec. Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Perlunya rehab atap Gedung BPU Kel. Amborawang Darat
464	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	RT 001 Kelurahan Margomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pembangunan Pagar Lapangan Sepakbola Kelurahan Margomulyo Karena Belum Tersedianya Pagar Lapangan Kelurahan Margomulyo
465	Hibah Kepada SMA/SMK/SLB swasta	Jl. Said Usman Al Kaf RT. 05, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	Pengajuan Lapangan Olahraga / Sepak Bola
466	Peningkatan Kualitas Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	samboja, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kumuh (sesuai SK Kumuh)
467	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan bukan Jaringan Perpipaan	samboja, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	peningkatan kapasitas layanan air minum di kecamatan
468	Pembangunan Perkuatan Tebing di Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Bukit Raya Kec Samboja, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	longsoran tebing sungai, sehingga merusak permukiman penduduk dan sarana umum yang berada pinggiran sungai dan jalan
469	Hibah Kepada badan/lembaga/organisasi masyarakat Keagamaan	JL. BALIKPAPAN-HANDIL NO. 219, Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	250,000,000	PEMBANGUNAN ASRAMA PONPES AL-ARSYADI

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2024 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Samboja Barat Tahun Anggaran 2024 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala- kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Samboja Barat dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut

a) Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

b) Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana secara teknokratis prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, dimana kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan : *Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.*

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Samboja Barat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD Kecamatan Samboja Barat Tahun 2021-2026.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelummnya Kecamatan Samboja Barat mempunyai Visi yaitu : *Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Samboja Barat Yang Sejahtera "* dan Misi yaitu " *Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Bersih , Efektif,Efesien dan Melayani* " tujuan yaitu Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan,profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah. Meningkatkan sarana

infrastruktur sebagai akses masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan partisipasi masyarakat / perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang Kecamatan meningkatkan kelancaran proses administrasi kependudukan dan meningkatkan keamanan lingkungan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu "*Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan*", yang artinya meningkatnya tertib administrasi pemerintah dan kualitas pelayanan publik dan meningkatnya Interkoneksitas antar wilayah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Samboja Barat merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (PD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Samboja Barat sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; dan Pembinaan pelayanan umum.

Penetapan Program dan kegiatan disamping menyesuaikan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang tingkat urgensinya tinggi terutama permasalahan Bidang Sarana dan Prasarana adalah penanggulangan banjir, sampah dan perbaikan sarana gang, serta jembatan sedangkan bidang sosial budaya adalah perbaikan RKB dan Peningkatan Sarana Posyandu memalui kegiatan PKK di wilayah Kecamatan Samboja Barat.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dan uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Samboja Barat diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Samboja Barat merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati.

Pemberantasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius.

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Demikian pula halnya dengan penanggunglan kemiskinan di Kecamatan Samboja Barat. Program dan kegitan yang dirancang pada tahun anggaran 2025 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pemberantasan kemisikinan pun menjadi salah satu indikator pencapaian kinerja didalam perjanjian kinerja antara Camat kepada Bupati, dimana terdapat 2(dua) indikator yaitu yang pertama membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah. Yang kedua

melakukan pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Samboja Barat.

2. Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Samboja Barat diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota.

3. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Samboja Barat sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki berbagai potensi ekonomi yang memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara. Potensi itu terutama terkait dengan bidang perkebunan kelapa sawit, dimana di Kecamatan Samboja Barat terdapat beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta yang cukup besar dan juga Tambang Batu Bara, Perikanan yang ada di desa/Kelurahan diwilayah Kecamatan Samboja Barat dan ada juga sarang burung walet yang bisa dikatakan cukup banyak.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Samboja Barat melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b) Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

1) Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

a. Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Samboja Barat Tahun 2025 adalah 4 Program dengan 21 Kegiatan yang terdiri dari 39 sub kegiatan.

2) Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

a. Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Samboja Barat sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Samboja Barat dan

b. melingkupi semua Desa dan Kelurahan.

3) Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan. Adapun secara detail akan kami sajikan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 pada tabel TC. 33 sebagai berikut :

TC. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3		4	5	6					
7.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Kec Samboja Barat**	**Nilai**	**70**	**19,019,200,173**	**APBD**		**Nilai**	**70**	**33,635,120,190**
7.1.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec Samboja Barat**	**dokumen**	**3**	605,000,000	APBD		**dokumen**	**3**	665,500,000
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kec Samboja Barat	dokumen	2	300,000,000	APBD		dokumen	2	330,000,000
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Samboja Barat	laporan	2	25,000,000	APBD		laporan	2	27,500,000
7.1.1.2.0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Samboja Barat	dokumen	3	140,000,000	APBD		dokumen	3	154,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec Samboja Barat	dokumen	2	5,000,000	APBD		dokumen	2	5,500,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec Samboja Barat	dokumen	2	5,000,000	APBD		dokumen	2	5,500,000
7.1.1.2.0106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Samboja Barat	laporan	2	70,000,000	APBD		laporan	2	77,000,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Samboja Barat	laporan	2	60,000,000	APBD		laporan	2	66,000,000
7.1.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**Kec Samboja Barat**	**laporan**	**7**	12,409,272,576	APBD		**laporan**	**7**	23,650,199,834
7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Samboja Barat	orang	75	11,915,272,576	APBD		orang	75	23,106,799,834
7.1.1.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Samboja Barat	laporan	1	25,000,000	APBD		laporan	1	27,500,000
7.1.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec Samboja Barat	laporan	5	444,000,000	APBD		laporan	5	488,400,000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					25,000,000	APBD				27,500,000

7.1.1.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan**	**Kec Samboja Barat**	**unit**	**1030**	265,800,000	APBD		**unit**	**1030**	292,380,000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					25,000,000	APBD				27,500,000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					150,000,000	APBD				165,000,000
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					50,000,000	APBD				55,000,000
7.1.1.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec Samboja Barat	laporan	**2**	40,800,000	APBD		laporan	**2**	44,880,000
7.1.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**Kec Samboja Barat**	**orang**	**23**	322,494,000	APBD		**orang**	**23**	354,743,400
7.1.1.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec Samboja Barat	Paket	34	272,494,000	APBD		Paket	34	299,743,400
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec Samboja Barat	orang	20	50,000,000	APBD		orang	20	55,000,000
7.1.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia**	**Kec Samboja Barat**	**Layanan**	**6**	1,921,289,000	APBD		**Layanan**	**6**	2,413,417,900
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec Samboja Barat	Paket	59	38,497,000	APBD		Paket	59	42,346,700
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec Samboja Barat	Paket	107	380,422,000	APBD		Paket	107	718,464,200
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec Samboja Barat	Paket	20	16,457,000	APBD		Paket	20	18,102,700
7.1.1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec Samboja Barat	Paket	202	256,190,000	APBD		Paket	202	281,809,000
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec Samboja Barat	Paket	79	311,563,000	APBD		Paket	79	342,719,300
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Samboja Barat	Laporan	718	918,160,000	APBD		Laporan	718	1,009,976,000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Kec Samboja Barat			-	APBD				-
7.1.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**Kec Samboja Barat**	**unit**	**52**	481,808,000	APBD		**unit**	**52**	1,729,988,800
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Samboja Barat	unit	1	-	APBD		unit	1	600,000,000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kec Samboja Barat	unit	1	60,000,000	APBD		unit	1	666,000,000
7.1.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec Samboja Barat	unit	51	421,808,000	APBD		unit	51	463,988,800
7.1.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**Kec Samboja Barat**	**bulan**	**12**	2,131,077,597	APBD		**bulan**	**12**	2,344,185,357
7.1.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Samboja Barat	laporan	1584	46,448,000	APBD		laporan	1584	51,092,800
7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec Samboja Barat	Laporan	12	676,598,777	APBD		Laporan	12	744,258,655
7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec Samboja Barat	Laporan	12	1,408,030,820	APBD		Laporan	12	1,548,833,902

7.1.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**Kec Samboja Barat**	**unit**	**150**	372,459,000	APBD		**unit**	**150**	1,609,704,900
7.1.12.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec Samboja Barat	unit	8	50,000,000	APBD		unit	8	255,000,000
7.1.12.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**Kec Samboja Barat**	unit	85	62,059,000	APBD		unit	85	68,264,900
7.1.12.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec Samboja Barat	unit	3	210,400,000	APBD		unit	3	731,440,000
7.1.12.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec Samboja Barat			50,000,000	APBD				555,000,000
			Kec Samboja Barat			500,000,000	APBD				550,000,000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan					150,000,000	APBD				165,000,000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					350,000,000	APBD				385,000,000
7.1.2.2.02			**Kec Samboja Barat**			10,000,000	APBD				25,000,000
7.12.2.02.02			Kec Samboja Barat			10,000,000	APBD				25,000,000
7.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP**	**Kec Samboja Barat**	**Persen**	**75**	**817,870,750**	**APBD**		**Persen**	**75**	**899,657,825**
		Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan		**Persen**	**100**	**5,600,000,000**	**APBD**		**Persen**	**100**	**6,160,000,000**
7.1.2.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat**	**Kec Samboja Barat**	**Kegiatan**	**150**	6,417,870,750	APBD		**Kegiatan**	**150**	7,059,657,825
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						APBD				
7.12.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec Samboja Barat	Laporan	12	817,870,750	APBD		Laporan	12	899,657,825
7.12.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Samboja Barat	Laporan	97	5,600,000,000	APBD		Laporan	97	6,160,000,000
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif**	**Kec Samboja Barat**	**Persen**	**727**	**20,965,400,000**	**APBD**		**Persen**	**727**	**23,133,440,000**
7.1.3.2.01	**Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Kec Samboja Barat**			110,000,000	APBD				192,500,000
7.13.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Kec Samboja Barat			85,000,000	APBD				165,000,000
7.13.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kec Samboja Barat			25,000,000	APBD				27,500,000
7.1.3.2.06	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan**	**Kec Samboja Barat**	**Kegiatan**	**80**	6,875,000,000	APBD		**Kegiatan**	**80**	7,562,500,000
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec Samboja Barat	Lembaga Kemasyarakatan	95	55,000,000	APBD		Lembaga Kemasyarakatan	95	60,500,000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kec Samboja Barat	Unit	93	4,050,000,000	APBD		Unit	93	4,455,000,000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Samboja Barat	Orang/Unit	159	2,700,000,000	APBD		Orang/Unit	159	2,970,000,000
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kec Samboja Barat	Laporan	2	70,000,000	APBD		Laporan	2	77,000,000

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan**	**Kec Samboja Barat**	**Kali**	**41**	13,805,400,000	APBD		**Kali**	**41**	15,185,940,000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec Samboja Barat	Lembaga Kemasyarakatan	**41**	13,605,400,000	APBD		Lembaga Kemasyarakatan	**41**	14,965,940,000
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Kec Samboja Barat			50,000,000	APBD				55,000,000
	Penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Kec Samboja Barat	Unit	2	150,000,000	APBD		Unit	2	165,000,000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Kec Samboja Barat**			175,000,000	APBD				192,500,000
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					175,000,000	APBD				192,500,000
			Kec Samboja Barat			**0**	APBD				**0**
			Kec Samboja Barat			**0**	APBD				**0**
			Kec Samboja Barat			**0**	APBD				**0**
			Kec Samboja Barat			-	APBD				-
			Kec Samboja Barat			-	APBD				-
			Kec Samboja Barat				APBD				
7.1.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec Samboja Barat**	**Persentase**	**7145**	200,000,000	APBD		**Persentase**	**7145**	220,000,000
7.1.5.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan**	**Kec Samboja Barat**	**Kegiatan**	**5**	**200,000,000**	**APBD**		**Kegiatan**	**5**	**220,000,000**
7.1.5.2.014	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec Samboja Barat	Orang	1103	200,000,000	APBD		Orang	1103	220,000,000
	JUMLAH					**46,602,470,923**		-			**64,048,218,015**

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Kecamatan Samboja Barat Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Samboja Barat tahun 2021 – 2026 dan merupakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Samboja Barat Periode Tahun 2025.

Bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Samboja Barat Tahun 2025 dimaksud untuk mengidentifikasi perkiraan sumber daya dan dana pembangunan serta dengan Rencana Kerja Kecamatan Samboja Barat Tahun 2025 ini juga diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Untuk itu mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ini, akan diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Kutai Kartanegara. Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH